



# PROSIDING KONGRES BAHASA INDONESIA XI

Menjayakan Bahasa  
dan Sastra Indonesia

Jakarta, 28—31 Oktober 2018



Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2019



# PROSIDING KONGRES BAHASA INDONESIA XI

Menjayakan Bahasa  
dan Sastra Indonesia

Jakarta, 28—31 Oktober 2018



Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
2019

# PROSIDING KONGRES BAHASA INDONESIA XI

**Diterbitkan pada tahun 2019**

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan  
Jalan Daksinapati Barat IV  
Rawamangun  
Jakarta Timur

**Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang**

BB 499.210 6 PRO p	Prosiding Kongres Bahasa Indonesia XI/Dadang Sunendar, Muh. Abdul Khak, Gufran Ali Ibrahim, Hurip Danu Ismadi, dan Emi Emilia (Penanggung jawab); Dadang Sunendar dkk. ( <i>Reviewer</i> ); Eko Endarmoko dkk. (Ed.) Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2019, xiv, 1155 hlm.; 28 cm.
-----------------------------	---

**ISBN: 978-602-437-723-6**

## **DEWAN REDAKSI**

### **Pengarah**

Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.

Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

### **Penanggung Jawab**

Drs. Muh. Abdul Khak, M.Hum.

Sekretaris Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S.

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Prof. Dr. Emi Emilia, M.Ed., Ph.D.

Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

### **Sekretaris**

Dr. Luh Anik Mayani, M.Hum.

### **Penyunting Akhir**

1. Eko Endarmoko
2. Dr. Luh Anik Mayani, M.Hum.
3. Endah Nur Fatimah, S.Pd.
4. Sulastri, S.S.
5. Riswanto, S.S.
6. Elvi Susanti, M.Pd.
7. Tri Wulandari, M.Hum.
8. Muhamad Raden Sunny, S.Pd.

### **Ilustrator**

Nurjaman, S.Ds.

Riko Rachmat Setiawan

### **Pengatak**

Ladislaus Laga Monang, S.Sos.

Dwi Estina, S.S.

## ***REVIEWER***

1. Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.
2. Drs. Muh. Abdul Khak, M.Hum.
3. Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S.
4. Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.
5. Prof. Dr. Emi Emilia, M.Ed., Ph.D.
6. Prof. Dr. Atmazaki
7. Prof. Dr. Endry Boeriswati
8. Prof. Dr. Pudentia MPSS
9. Prof. Dr. Dendy Sugono
10. Prof. Dr. Suwardi Endraswara
11. Prof. Dr. Djoko Saryono
12. Prof. Ilza Mayuni
13. Prof. Dr. Felicia Utorodewa
14. Dr. Yeyen Maryani
15. Dr. Ganjar Harimansyah Wijaya
16. Dr. Handoyo Sastromiharjo
17. Dr. Munawar Holil
18. Dr. Katharina E. Sukamto
19. Dr. Liliana Muliastuti
20. Dr. Obing Katubi
21. Dr. Mu'jizah
22. Dr. Tengku Syarfina
23. Dr. Sastri Sunarti
24. Ivan Lanin, M.T.I.
25. Drs. Djajat Sudrajat
26. Drs. S.S.T. Wisnu Sasasangka, M.Pd.
27. Dra. Erlis Mujiningsih, M.Hum.
28. Dra. Wati Kurniawati, M.Hum.
29. Winci Firdaus, M.Hum.
30. Dina Amalia Susanto, M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pembentuk hati dan pikiran keindonesiaan, termasuk dalam bentuk kesusastraannya. Kehendak akan bersatu (*le désir d'être ensemble* dalam ungkapan Ernest Renan) sebagai syarat adanya bangsa telah disepakati pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam wujud bahasa persatuan. Elemen bahasa—bukan agama dan/atau ras—dipilih sebagai lambang kesatuan negara-bangsa Indonesia yang bermartabat.

Pluralisme dan multilingualisme bahasa di Indonesia perlu dikelola untuk kebutuhan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi melalui pendidikan. Kebijakan yang memasukkan tiga jenis bahasa dalam pendidikan harus dapat meningkatkan peran bahasa-bahasa yang hidup di Indonesia. Bahasa Indonesia harus semakin mantap sebagai peneguh identitas bangsa, penyatu keberagaman suku dan/atau ras di Indonesia. Bahasa daerah harus mampu membentuk generasi muda Indonesia yang sadar akan kebesaran tradisi dan budayanya. Sementara itu, bahasa asing harus mampu menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional.

Saat ini bahasa Indonesia sedang berjuang untuk memantapkan perannya sebagai lambang identitas bangsa di tengah maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik. Penegakan kejayaan identitas bangsa ini perlu dilakukan melalui penegakan peraturan kebahasaan sebagai upaya untuk mengendalikan penggunaan bahasa asing di ruang publik tanpa mengendurkan upaya untuk menguasai bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya sebagai strategi—selain sebagai sarana komunikasi—untuk memahami cara berpikir penutur bahasa itu.

Globalisasi juga telah membawa konsekuensi bangsa Indonesia berintegrasi dengan bangsa lain sehingga terbentuk sebuah masyarakat antarbangsa, seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Integrasi antarbangsa itu diharapkan berdampak positif untuk menunjukkan kejayaan jati diri dan daya saing bangsa Indonesia. Untuk itu, pemanfaatan bahasa dan sastra sebagai ilmu strategi kebahasaan perlu dikembangkan dan diterapkan dalam bentuk diplomasi lunak dengan wawasan kebinekaan yang lebih luas guna menjadikan bahasa dan sastra Indonesia secara internasional setara dengan bahasa dan sastra dari negara maju yang lain.

Sementara itu, yang tidak kalah penting kemajuan teknologi informasi yang telah berkembang begitu rupa sehingga berdampak pada cara bertindak dan bertutur yang sekaligus mencerminkan hati dan pikiran. Kehalusan hati dan pikiran—yang mestinya terungkap melalui sastra—telah mulai luntur. Hanya dengan mengetukkan jari dan jempol pada tombol gawai, sangat mudah seseorang menyebarkan kata-kata kasar, perkataan bohong, atau ungkapan yang bernilai rasa dan pikiran negatif. Untuk mengantisipasi kemungkinan retaknya kesatuan bangsa Indonesia sebagai akibat perkembangan zaman ini, bahasa dan sastra juga diharapkan menjadi landasan kekuatan kultural bangsa Indonesia untuk membangun karakter bangsa.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada 28—31 Oktober 2018 telah menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia XI

(KBI XI) dengan tema “Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia”. Kongres tersebut bertujuan menjayakan negara-bangsa Indonesia melalui bahasa dan sastra Indonesia. Secara khusus, KBI XI membahas peluang dan tantangan dalam pengembangan, pembinaan, perlindungan, pemanfaatan, serta penegakan kebijakan bahasa dan sastra Indonesia guna membawa negara-bangsa Indonesia berjaya pada era global ini.

Prosiding Kongres Bahasa Indonesia XI ini terbagi ke dalam 9 bab yang disesuaikan dengan jumlah subtema KBI XI, yaitu (1) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; (2) Bahasa Indonesia di Ruang Publik; (3) Bahasa, Sastra, dan Teknologi Informasi; (4) Ragam Bahasa dalam Berbagai Ranah Kehidupan; (5) Pemetaan dan Kajian Bahasa dan Sastra Daerah; (6) Pengelolaan Bahasa dan Sastra Daerah; (7) Bahasa, Sastra, dan Kekuatan Kultural Bangsa Indonesia; (8) Bahasa dan Sastra untuk Strategi dan Diplomasi; dan (9) Politik dan Perencanaan Bahasa dan Sastra. Prosiding ini memuat 81 judul makalah. Setiap bab menampilkan 9 makalah dan/atau transkripsi pemaparan dari para pembicara kunci, pembicara undangan, dan pembicara seleksi. Makalah dan/atau transkripsi pemaparan tersebut diikuti dengan Catatan Kongres Bahasa Indonesia XI yang terdiri atas rangkuman penyajian makalah dan rangkuman diskusi (tanya jawab).

Makalah dan/atau transkripsi dalam Prosiding Kongres Bahasa Indonesia XI telah melalui proses penyuntingan. Selain itu, untuk mengantisipasi isu plagiarisme, makalah dalam Prosiding KBI XI ini juga telah diuji dengan layanan uji plagiarisme Turnitin. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras para penyunting Prosiding KBI XI ini.

Terakhir, kami juga perlu menyampaikan bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Walaupun sudah melalui tahap penyeleksian, perevisian, dan penyuntingan, makalah dan/atau transkripsi dalam Prosiding KBI XI ini mungkin masih menyisakan kekurangcermatan. Oleh karena itu, kami mohon maaf dan berbagai kritik dan saran mohon disampaikan kepada kami melalui pos-el [badan.bahasa@kemdikbud.go.id](mailto:badan.bahasa@kemdikbud.go.id). Tidak lupa kami ucapkan selamat membaca dan semoga informasi dalam Prosiding KBI XI ini bermanfaat bagi pengembangan, pembinaan, perlindungan, pemanfaatan, serta penegakan kebijakan bahasa dan sastra di Indonesia.

Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan  
Jakarta, Juli 2019

## DAFTAR ISI

<b>DEWAN REDAKSI</b> .....	iii
<b>REVIEWER</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii

### **A. SUBTEMA 1: PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**

<b>1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia</b>	
Muhajir Effendi .....	1
<b>2. Literasi dan Daya Saing Bangsa</b>	
Najwa Shihab .....	2
<b>3. Bergawai-ria Merenungkan Pendemokrasian Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa</b>	
George Quinn .....	6
<b>4. Tantangan Mewujudkan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang Efektif pada Era Revolusi Industri 4.0</b>	
Sarwiji Suwandi .....	13
<b>5. Literasi Sastra di Usia Prapubertas untuk Membentuk Insan Indonesia yang Berkarakter Melalui Pendekatan Psikologi Bahasa</b>	
Gusdi Sastra .....	28
<b>6. Pemetaan Genre Teks Bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013 (Revisi) Jenjang SMA</b>	
Khusnul Fatonah dan Gunawan Wiradharma .....	47
<b>7. Asesmen Autentik Pembelajaran Bahasa Indonesia SMA: Pemanfaatan Instrumen Berdasarkan Analisis Kebutuhan</b>	
Murtiana Nainggolan, Benedictus Sudiyana, dan Yohanes Sugiyanto.....	67
<b>8. Apresiasi Kebinekaan Melalui Pembelajaran Penggunaan Ujaran Toleran (<i>Verbal Tolerance</i>) pada Siswa Usia Dini</b>	
Nuraini Fatimah .....	85
<b>9. Penerapan Model Pembelajaran Kenikir untuk Mendongkrak HOTS di SMA Bina Mulia Pontianak 2017/2018</b>	
Teddy Fiktorius .....	100

### **B. SUBTEMA 2: PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK**

<b>1. Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik</b>	
Ermaya Suradinata .....	119
<b>2. Penegakan Pelaksanaan Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik</b>	
La Ode Ida .....	125



<b>3. Bahasa, Sastra, dan Teknologi Informasi: Menyikapi Ancaman, Menjajaki Peluang</b>	
Andika Dutha Bachari .....	130
<b>4. Nasionalisme dalam Komunikasi Global (Pelanggaran atas Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik)</b>	
Azwar.....	137
<b>5. Superioritas Bahasa Asing di Ruang Publik yang Menggerus Nasionalisme Bangsa</b>	
Dewi Kusumaningsih.....	156
<b>6. Bahasa Indonesia di Ruang Publik: Penggunaannya dalam Debat Publik Menjelang Pilpres 2019</b>	
I Ketut Darma Laksana .....	171
<b>7. Strategi Penegakan Peraturan Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik</b>	
Munira Hasjim .....	192
<b>8. Peran Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing dalam Strategi Pemasaran Kue Artis di Kota Bandung</b>	
Tri Indri Hardini, Temmy Widyastuti, Yatun Romdonah Awaliah.....	208
<b>9. Larangan Membuang Sampah: Potret Budaya Masyarakat Melalui Pemakaian Bahasa Indonesia di Ruang Publik</b>	
Wira Kurniawati .....	228

### C. SUBTEMA 3: BAHASA, SASTRA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

<b>1. Bahasa, Sastra, dan Teknologi Informasi</b>	
Gun Gun Iswadi .....	243
<b>2. Pengembangan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TBBI) Daring Terpadu</b>	
David Moeljadi .....	247
<b>3. Penggunaan Bahasa dan Sastra dalam Teknologi Informasi sebagai Penguat Karakter Bangsa</b>	
Ivan Lanin .....	265
<b>4. Multimedia Kritik Sastra</b>	
Dessy Wahyuni .....	269
<b>5. Perkembangan Terkini Penelitian Sastra Akademik dan Nonakademik Menghadapi Revolusi Industri 4.0</b>	
Muhammad Fadli Muslimin.....	282
<b>6. Penerapan Literasi Digital Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia</b>	
Muhammad Aqmal Nurcahyo, Yunika Afryaningsih.....	289
<b>7. Keberterimaan dan Kebermafaatan Serapan Kata Asing dalam Bidang Teknologi Informasi oleh Penutur Indonesia</b>	
M. Zaim.....	310

8. E-Mikuta (Komik Saku Kosakata Elektronik): Media Pembelajaran BIPA Berbasis Teknologi Prima Vidya Asteria, Devi Nur Farida.....	326
9. Korpus Beranotasi: ke Arah Pengembangan Korpus Bahasa-Bahasa Indonesia Totok Suhardijanto, Arawinda Dinakaramani .....	339
<b>D. SUBTEMA 4: RAGAM BAHASA DAN SASTRA DALAM BERBAGAI RANAH KEHIDUPAN</b>	
1. Ragam Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Ranah Kehidupan Ahmad Tohari .....	357
2. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Bahasa dan Sastra Amich Alhumami.....	363
3. Meneliti Bahasa Isyarat dalam Perspektif Variasi Bahasa Silva Tenrisara Isma.....	366
4. Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Mengembalikan <i>Di</i> ke Ruang Publik Uu Suhardi .....	383
5. Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial Suatu Tinjauan Linguistik Forensik: Studi Kasus Penggunaan Bahasa dalam Twitter Sriyanto .....	395
6. Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia Suku Bajo Sampela: Pendekatan Pragmatik Susiaty, Risman Iye, dan A. Yusdianti Tenriawali.....	417
7. Honorifik dalam Tuturan Permintaan Anggota Legislatif Daerah di Indonesia Syafuruddin dan Abdul Rahman Rahim .....	437
8. Pengembangan Fungsi Ragam Bahasa Isyarat Alamiah, Bisindo, sebagai Sarana Pencerdasan Orang Tuli F.X. Rahyono dan Adhika Irlang Suwiryo .....	451
9. Implikatur dalam Lirik Lagu yang Dicekal oleh Komisi Penyiaran Indonesia Rizki Hidayatullah Nur Hikmat .....	468
<b>E. SUBTEMA 5: PEMANFAATAN BAHASA DAN SASTRA SEBAGAI PEREKAT KEBINEKAAN UNTUK INDUSTRI KREATIF, PARIWISATA, DAN KEARIFAN LINGKUNGAN</b>	
1. Pemanfaatan Bahasa dan Sastra sebagai Perikat Kebinekaan untuk Industri Kreatif, Pariwisata, dan Kearifan Lingkungan Ricky Joseph Pesik.....	485

2. Peran Teknologi dan Kerja Sama Tim dalam Pendokumentasian Bahasa	
Nikolaus P. Himmelmann .....	491
3. Pemetaan dan Kajian Bahasa dan Sastra Daerah: Pendokumentasian dan Pervitalisasian	
Jufrizal.....	499
4. Penelitian Keekerabatan Bahasa dan Sastra Daerah di Indonesia	
Melani Budianta.....	509
5. Pemetaan Bahasa di Kabupaten Gresik: Sebuah Kajian Dialektologi	
Ahmad Muzaki.....	540
6. Korespondensi dan Variasi Bunyi Bahasa-Bahasa Nusantara Mempermudah Belajar Bahasa	
Yulia Esti Katrini dan Rangga Asmara.....	558
7. Konstruksi Peta Cerita Rakyat Madura di Pulau Madura	
Iqbal Nurul Azhar .....	579
8. Cerita-Cerita Pesugihan di Jawa: Pola Keekerabatan Sastra dan Paradoks Teks-Konteks	
Mashuri .....	598
9. Tanding Sastra <i>Putran</i> : Sebuah Analisis Wacana Foucault terhadap Teks Centhini Pascareformasi	
Rendra Augusta, Dwi Susanto, Wakit Abdullah Rais .....	623
<b>F. SUBTEMA 6: BAHASA SEBAGAI SARANA PERTAHANAN KEAMANAN, PERDAMAIAN, SERTA PEMBANGUNAN</b>	
1. Bahasa sebagai Sarana Pertahanan, Keamanan, Perdamaian, serta Pembangunan	
Eko Sulistyو .....	637
2. Bahasa sebagai Sarana Pertahanan, Keamanan, Perdamaian, serta Pembangunan	
Mahsun.....	642
3. Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Bahasa dan Sastra Daerah	
James Modouw .....	670
4. Pengelolaan Bahasa dan Sastra Daerah	
Saut Poltak Tambunan .....	675
5. Upaya Memosisikan Bahasa di dalam Masyarakat Multilingualisme Era Mutakhir Abad Ke-21	
Givari Jokowi, Beta Tri Wicaksono, Imam Rosyad .....	689
6. Kebijakan dan Perlindungan terhadap Bahasa Daerah: Perspektif Kewenangan Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus	
Hugo Warami.....	700

<b>7. Makin Ramai berkat Rancage: Seratus Tahun Perkembangan Sastra Bali Modern</b>	
I Nyoman Darma Putra .....	715
<b>8. <i>Numeral Classifier</i> Bahasa Minangkabau Isolek Aia Bangih</b>	
Sri Wahyuni, Nadra, dan Ria Febrina .....	734
<b>9. Simpang Siur Pengelolaan Pembelajaran Bahasa Daerah Bugis dan Bahasa Daerah Makassar</b>	
Syahrudin .....	752

#### **G. SUBTEMA 7: BAHASA, SASTRA, DAN KEKUATAN KULTURAL BANGSA**

<b>1. Bahasa, Sastra, dan Kekuatan Kultural Bangsa</b>	
Hariyono.....	765
<b>2. Pemetaan dan Kajian Bahasa dan Sastra Daerah</b>	
Multamia Lauder.....	773
<b>3. Pengelolaan Bahasa dan Sastra Daerah</b>	
Pudentia M.P.S.S. ....	782
<b>4. Revitalisasi Semangat Bahari untuk Menyongsong Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Melalui Karya Sastra Melayu</b>	
Agik Nur Efendi.....	788
<b>5. Suara Ekoliterasi Campursari dalam Lagu Hits Didi Kempot 2018</b>	
Eka Sugeng Ariadi .....	806
<b>6. Kajian Bentuk dan Makna Sonteng Pertanian pada Masyarakat Dusun Kemiri, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	
Itaristanti .....	820
<b>7. <i>Cablaka</i>: Penghela Kejujuran dalam Cerita Rakyat Banyumasan dan Urgensinya sebagai Muatan Pendidikan</b>	
Meina Febriani .....	842
<b>8. Ketidakstabilan Ruang Tubuh sebagai Strategi Pascakolonial Melalui Karya Sastra Indonesia</b>	
Risma Nur Rahmawati .....	859
<b>9. Literasi Folklor: Transmisi Karakter Luhur dalam Sastra Lisan Bugis Makassar</b>	
Sitti Aida Azis.....	875

## **H. SUBTEMA 8: BAHASA DAN SASTRA UNTUK STRATEGI DAN DIPLOMASI**

- 1. Bahasa dan Sastra untuk Strategi dan Diplomasi**  
Sutan Adil Hendra..... 889
- 2. Memajukan Bahasa, Memajukan Budaya**  
Hilmar Farid..... 898
- 3. Penyebaran Bahasa dan Sastra Indonesia Melalui Pengajaran BIPA dan Ekspedisi Budaya**  
Liliana Muliastuti..... 919
- 4. Pendidikan Bahasa Indonesia pada Zaman Dahulu dan Masa Kini di Jepang**  
Kyoko Funada..... 930
- 5. BIPA untuk Tujuan Khusus bagi TKA Korea di Bank Woori Saudara: Sebuah Respons terhadap Kebijakan Menaker**  
Ade Mulyanah..... 944
- 6. Pengenalan Bahasa Indonesia di Kamboja Melalui Pengajaran BIPA: Perwujudan Wacana Bahasa Indonesia sebagai Bahasa ASEAN**  
Exti Budihastuti..... 964
- 7. Studi Evaluatif Bahan Ajar Membaca Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Tingkat Pemula di Moscow, Rusia**  
Mochamad Whilky Rizkyanfi..... 976
- 8. Diplomasi dan Strategi Bahasa dan Sastra: Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pergaulan Internasional**  
Kishor Kumar Das..... 995
- 9. Amunisi Sepatah Bait: Telaah Bahasa dan Sastra sebagai Sarana Ketahanan dan Keamanan Indonesia Tahun 1945—1966**  
Yebqi Farhan..... 1018

## **I. SUBTEMA 9: POLITIK PERENCANAAN BAHASA DAN SASTRA**

- 1. Politik dan Perencanaan Bahasa dan Sastra**  
Dadang Sunendar..... 1035
- 2. Masyarakat Multilingual dan Kebijakan Bahasa di Indonesia**  
Mikihiro Moriyama..... 1043
- 3. Internalisasi dan Internasionalisasi Bahasa Indonesia**  
Suparno..... 1059
- 4. Promosi Badan Bahasa di Ruang Publik**  
Ferdiansyah..... 1078
- 5. Internalisasi dan Internasionalisasi Bahasa Indonesia**  
Dendy Sugono..... 1081

<b>6. Penguatan Bahasa Indonesia Melalui Penyerapan dan Pemandanan Istilah Asing pada Surat Kabar</b>	
Baharman .....	1084
<b>7. Analisis Komponen Penilaian dalam Perencanaan Pengajaran Sastra Jenjang SMP di Kota Cimahi</b>	
Saidiman, Rina Heryani, Erlinda Nofasari.....	1102
<b>8. Variasi Bahasa Indonesia Penutur Jati Bahasa Maanyan dalam Internalisasi Bahasa Indonesia</b>	
Kity Karena .....	1136
<b>9. Literasi Berbasis Aplikasi Digital sebagai Upaya Politik Bahasa di Sekolah Menengah</b>	
Nurhaidah, Muhamad Zainal Arifin.....	1155





## **A. SUBTEMA 1 : PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**

### **1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia**

Judul	: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Pembicara	: Muhadjir Effendi
Jabatan	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Hari, Tanggal	: Minggu, 28 Oktober 2018
Pukul	: 16.10—16.40
Moderator	: -

### **Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Tidak mungkin membangun suatu wilayah tanpa membangun bahasanya. Bahasa memegang peran penting dalam pembangunan dan pengembangan daerah.
2. Aset terbesar bangsa Indonesia adalah persatuan, kerukunan, dan persaudaraan.
3. Indonesia ditakdirkan memiliki bahasa nasional, bahasa Indonesia. Belum sampai 100 tahun, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat.
4. Peran dan fungsi bahasa Indonesia sangat penting seperti dirumuskan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
5. Aset paling berharga bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah berhasil menyatukan keragaman etnik dan latar belakang sosial masyarakat di Indonesia.
6. Bahasa Indonesia memantapkan dan memperkuat perannya sebagai lambang identitas bangsa di tengah maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik.
7. Ruang publik di Indonesia harus tertib dan taat dalam penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing di ruang publik harus ditertibkan. Bahasa asing dapat digunakan, tetapi harus disesuaikan dengan keadaan yang ada.
8. Guru-guru bahasa Indonesia diinstruksikan agar menguasai bahasa daerah dan bahasa asing di dalam menjalankan tugas.

### **Isu-Isu Penting:**

1. Pentingnya menjaga persatuan, kerukunan, dan persaudaraan di Indonesia.
2. Pemanfaatan bahasa dan sastra perlu dikembangkan agar setara dengan bahasa dan sastra internasional.
3. Cintai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4. Melalui Kongres Bahasa Indonesia XI, pengguna ruang publik di Indonesia diimbau tertib dan taat dalam pemakaian bahasa Indonesia.





## 2. Literasi dan Daya Saing Bangsa

Judul	: Literasi dan Daya Saing Bangsa
Pembicara	: Najwa Shihab
Jabatan	: Duta Baca
Hari, Tanggal	: Selasa, 30 Oktober 2018
Pukul	: 08.00—10.00
Moderator	: -

Asalamualaikum wr. wb.

Topik yang diberikan kepada saya adalah Literasi dan Daya Saing Bangsa dan itu mungkin karena saya ditunjuk menjadi Duta Baca Indonesia oleh Perpustakaan Nasional, saya diundang ke sini. Namun, saya ingin hadir di sini pada pagi ini lebih sebagai jurnalis dan pengampu program Mata Najwa. Izinkan saya menyampaikan refleksi tentang bagaimana interaksi saya dengan bahasa Indonesia, sebagai pemandu program bincang-bincang di televisi, Mata Najwa, selama sembilan tahun terakhir.

Saya hendak menunjukkan beberapa contoh kata ini: *pesanggrahan, gandrung, kesumat, bertungkus-lumus, mengampu, degil, majal, semenjana, selaksa, dan jumud*. Semua ini adalah secuil dari ribuan kata yang pernah muncul dalam narasi pembukaan dan penutupan program Mata Najwa yang saya ampu sejak sembilan tahun silam. Pemirsa, penonton, terkadang juga sahabat saya sendiri bertanya kepada saya, apa maksud dari kata-kata tertentu yang saya pilih. Kata-kata yang dinilai tidak jamak atau jarang dipakai atau jarang didengar. Tiap kali ada yang bertanya seperti itu saya merasa sedikit bahagia karena berhasil memperkenalkan sesuatu yang baru.

Saya bukan penulis, tetapi sesekali menulis. Saya menyadari potensi bahasa Indonesia, terutama saat secara rutin memandu program gelar wicara atau *talkshow*. Mata Najwa barangkali masih kalah populer dibandingkan dengan sinetron atau program gosip, tetapi saya merasa sedikit banyak kehadiran Mata Najwa dapat dimanfaatkan untuk banyak isu, salah satunya dalam hal berbahasa Indonesia. Itulah yang mendorong saya secara sadar merancang narasi pembukaan dan penutupan Mata Najwa dengan gaya yang tidak semata-mata naratif, tetapi juga berima.

Tidak pernah saya berpretensi menjadi seorang juru pantun atau tetua adat yang masih membawakan mantra, tidak juga seorang munsyi atau penyair. Sama sekali tidak ada pretensi itu. Saat memutuskan menggunakan rima dalam narasi pembukaan dan penutupan Mata Najwa, mula-mula yang saya pikirkan secara sederhana adalah bagaimana tampil berbeda. Berpikir tentang cara berbeda ini merupakan hal yang lumrah di kalangan produser atau wartawan mana pun yang sedang merancang program televisi di antara begitu banyak program televisi yang lain di Indonesia. Dari waktu ke waktu saya semakin merasakan tantangan sekaligus keasyikannya. Melalui rima saya dipaksa lebih serius dalam berbahasa, juga lebih ketat dalam memilah kata. Saya tidak terlalu ketat dalam hal, misalnya, jumlah suku kata karena memang tidak ada niat menjadikan catatan Najwa sebagai puisi, misalnya. Namun, saya merasa tuntutan menggunakan bunyi suku akhir kata yang sama itulah yang membuat saya sering berpikir keras mencari padanan kata. Saya jadi terbiasa membuka-buka kamus, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia



maupun Tesaurus Bahasa Indonesia, dan secara berkala saya kemudian banyak menemukan kata yang bagi saya terasa baru karena tidak pernah atau jarang sekali dipakai, misalnya, *majal* atau *puspa*. Ini kata-kata yang menarik. Sesudah mencari di KBBI daring, barulah saya mengerti makna sesungguhnya dari kata-kata itu.

Didorong oleh kebutuhan memperbanyak varian kata itulah saya menyempatkan diri membaca banyak puisi, baik puisi penyair klasik maupun penyair modern. Dari Chairil Anwar, misalnya, saya pernah menggunakan kata *menjengking* yang saya temukan dalam puisinya yang jarang dikutip, yang berjudul *Dalam Kereta*.

### **Dalam Kereta**

*Hujan menebal jendela  
Semarang, Solo..., makin dekat saja  
Menangkap senja.  
Menguak purnama.  
Caya menyayat mulut dan mata.  
Menjengking kereta. Menjengking jiwa.  
Sayatan terus ke dada.*

Saya juga kerap merasakan keindahan bahasa Indonesia pada saat suasana yang ditekan tenggat. Bisa saja tiba-tiba saya merasakan keindahan itu, misalnya, betapa indahnya bahasa Indonesia mendeskripsikan benda planet yang menjadi pusat tata surya kita, *matahari*, gabungan dari kata *mata* dan *hari*. Kita bandingkanlah, umpamanya, dengan kata *sun* dalam bahasa Inggris atau *syam* dalam bahasa Arab. Rasa saya, gabungan *mata* dan *hari*, *matahari*, adalah pilihan yang luar biasa indah, amat puitis dan tentu saja Mata Najwa tidak berani disaingkan dengan *matahari*.

Begitulah, melalui sejumlah kata yang digunakan dalam narasi pembukaan dan penutupan Mata Najwa, sebisa mungkin saya menunjukkan bahwa bahasa Indonesia kita sangat kaya. KBBI Edisi Kelima memuat 127.000 lebih lema. Hampir pasti dalam umur kita yang singkat ini kita mustahil pernah mengucapkan atau menggunakan semuanya. Mungkin hanya sekitar 10% yang pernah kita gunakan dalam berbagai situasi dan suasana berkomunikasi.

Salah satu faedah membaca, kita tahu, yaitu memperkaya kosakata. Umumnya membaca dianggap punya faedah memperkaya pengetahuan, memperbanyak informasi, serta mempertajam perspektif kita dalam melihat persoalan. Seiring berjalannya waktu, lagi-lagi dari pengalaman, rutinitas menulis dan menyunting naskah pembukaan dan penutupan Mata Najwa, saya betul-betul menyadari bahwa membaca sangat bermanfaat untuk mengayakan kosakata. Dengan membaca buku, apalagi buku-buku bermutu yang ditulis oleh para pencinta bahasa, para pengarang yang kepekaan bahasanya begitu tinggi, kosakata kita akan terus bertambah. Saya percaya, kosakata yang kaya adalah modal penting kita dalam berkomunikasi.

Jika kita gagal berkata-kata, padahal isi kepala penuh dengan gagasan atau perasaan untuk diungkapkan, kita kerap menjadi agak emosional. Teman-teman penulis biasanya menggunakan istilah *writer's block* untuk meyebutkan situasi itu. Namun, jangan-jangan kegagalan kita berkata-kata dalam situasi tertentu itu disebabkan oleh keterbatasan perbendaharaan kata. Saya pernah baca, kosakata bagi penulis itu ibarat cat. Kalau kita pelukis yang hanya punya cat hitam dan putih atau terbatas, niscaya akan sulit menggambarkan pelangi. Hari-hari ini kira



merasakan betapa panas dan keruhnya cara berkomunikasi, terutama di media sosial. Polarisasi politik telah membuat media sosial seperti kurusetra, setiap hari adalah propaganda, setiap waktu adalah perang. Kita menyaksikan kebencian, caci maki, dan gerutuan yang menghasut tanpa henti. Kampret versus cebong, sesuatu yang jamak kita temukan dalam perbendaharaan kata di media sosial yang kemudian terangkat pada kebiasaan kita bercakap sehari-hari. Apakah ini artinya kita kehabisan gagasan untuk dibicarakan? Apakah kita kekurangan ide untuk didiskusikan?

Saya rasa sekaranglah saatnya kita membuka kemungkinan jawaban yang baru. Tidak, kita tidak kehabisan ide, kita tidak kehabisan gagasan, kita tidak kehabisan gaya untuk mencintai negeri ini. Namun, jangan-jangan kita sungguh kekurangan kosakata untuk mengungkapkan banyak hal rumit. Inilah perspektif saya sebagai wartawan, sebagai pemandu Mata Najwa. Mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya interaksi, teman-teman pencinta bahasa, kosakata yang jumlahnya begitu banyak, ratusan ribu itu, bisa kita petik satu demi satu. Kita kenalkan, kita sosialisasikan ke masyarakat sehingga ide dan gagasan betul-betul bisa tersampaikan melalui kosakata yang indah tanpa perlu menjadi penyair, seperti Chairil Anwar atau Joko Pinurbo, penyair favorit saya sejak lama. Kita bisa menjadi orang yang berpikir untuk mengungkapkan gagasan dan ide secara lebih runut. Insyaallah. Terima kasih.  
Wasalamualaikum wr.wb.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Najwa Shihab  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 08.00  
Moderator : Drs. Abdul Khak, M.Hum.  
Pencatat : Nadia Almira Sagitta

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Saya berbicara sebagai pengampu program Mata Najwa dan jurnalis. Selama sembilan tahun mengampu program Mata Najwa, saya memunculkan beberapa kata yang tidak jamak dipakai, seperti *pesanggrahan, gandrung, bertungkus lumus, mengampu, majal, degil, semenjana, selaksa, jumud, menjengking, dan kiwari*.
2. Saya membawakan Mata Najwa dengan gaya yang tidak semata-mata naratif, tetapi juga berima. Melalui rima, saya dipaksa lebih serius dalam berbahasa, juga lebih ketat dalam memilih kata. Saya jadi terbiasa membuka kamus dan tesaurus.
3. Ketika saya ditanya arti dari kata-kata tersebut, saya merasa sedikit bahagia karena telah memperkenalkan kata-kata yang jarang didengar.
4. Melalui narasi pembukaan dan penutupan Mata Najwa, saya berusaha menunjukkan betapa bahasa Indonesia sangat kaya.
5. Faedah membaca, antara lain, memperkaya kosakata. Kosakata yang kaya adalah modal penting kita berkomunikasi.
6. Jika kita gagal berkata-kata, padahal isi kepala penuh dengan gagasan yang hendak diungkapkan, biasanya kita menjadi emosional.
7. Ibarat cat, kalau hanya hitam dan putih tentu sulit menggambar pelangi. Begitu pula dengan bahasa. Kegagalan kita berkata-kata disebabkan oleh keterbatasan perbendaharaan kata.
8. Apakah panas dan keruhnya komunikasi saat ini karena polarisasi politik merupakan pertanda kita kekurangan ide untuk didiskusikan? Saya rasa tidak. Jangan-jangan kita hanya kekurangan kosakata untuk menuangkan gagasan.
9. Kita tidak perlu menjadi penyair, tetapi kita bisa menjadi orang yang bertutur secara lebih runut.



### 3. Bergawai-ria Merenungkan Pendemokrasian Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa

#### Bergawai-ria Merenungkan Pendemokrasian Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa George Quinn

Australian National University  
george.quinn@anu.edu.au; <https://georgequinn.academia.edu/>

#### Abstrak

Budaya digital sangat terasa dampaknya di bidang pendidikan di Indonesia. Aneka gawai dan perangkat lunak merata di tangan para siswa. Pendemokrasian teknologi digital ini membawa tantangan besar bagi guru, penyusun bahan ajar, dan sistem persekolahan. Telepon genggam dapat digunakan secara kreatif dalam kelas pembelajaran bahasa. Dengan memusatkan pelajaran bahasa pada pementasan sandiwara panjang yang divideokan dengan ponsel dan diunggah ke internet, meningkatkan kemampuan para siswa untuk bertutur secara benar dan runtut. Namun, pemanfaatan sumber dan alat digital di ruang kelas, yang berpotensi meningkatkan daya cipta dan kemampuan berbahasa para siswa, juga membawa risiko wibawa guru, buku, dan sekolah akan jatuh.

**Kata-kata kunci:** pendidikan bahasa, budaya digital, pendemokrasian teknologi, sandiwara, derajat guru

#### PENDAHULUAN

##### Budaya Pengacau

Dunia pendidikan di Indonesia berada di ambang pintu perubahan mahadahsyat yang dibawa oleh teknologi digital. Dampaknya sudah mulai terasa. Selama ini, anak didik kita menimba pengetahuan dari sistem persekolahan (khususnya guru dan buku) serta dari sumber wibawa yang tersusun secara hierarkis dari atas ke bawah (negara dan pemerintah, silabus dan sistem persekolahan, tokoh dan kitab agama, orang tua). Budaya didik ini akan dipukul rata untuk digantikan oleh tsunami digital yang tidak mengenal guru atau pun hierarki. Sekarang pun, lautan digital ini sudah menyusup masuk ke setiap sudut kehidupan sehari-hari, membawa penjejarangan (*networking*), inteligensi buatan, internet, robotika, uang elektronik, aneka algoritma, dan pertukaran informasi instan yang menembus perbatasan lama. Perubahan ini sering disebut “budaya pengacau” (*culture of disruption*). Budaya pengacau digital yang menyambar lingkungan ajar kita secara tidak terelakkan akan membuat porak-poranda sistem pendidikan kita dengan sumber wibawa dan susunan hierarkisnya. Guru, penyusun bahan ajar, pengelola pendidikan, dan orang tua terpanggil untuk hidup di tengah alam baru ini.

##### Berbelanja Prasmanan di Pasar Digital

Teknologi pembelajaran bahasa berkembang dengan kecepatan yang sungguh memusingkan kepala. Boleh dikatakan setiap hari muncul alat bantu, gawai, dan aplikasi baru yang menggoda guru bahasa untuk membelinya. Peralatan digital merata dengan berbagai wujud dalam berbagai bidang pembelajaran bahasa.



Dalam kungkungan sebuah uraian singkat, hanya satu dua contoh yang dapat saya berikan. Untuk mengelola program studi secara berdaya guna dan terpadu, ada sejumlah aplikasi, di antaranya, *Blackboard*, *Moodle*, dan *Canvas*. *Canvas* adalah yang terbaru. Penggunaannya dengan mudah dapat dikuasai oleh para guru dan pengelola prodi. Fiturnya tidak hanya merangkum unsur pokok pengelolaan, seperti pendaftaran, penjadwalan, pelacakan para siswa, komunikasi timbal-balik dengan para siswa, dan penyelenggaraan ujian. Ada pula berpuluh-puluh subaplikasi yang menjadi kerangka lengkap bagi penyajian isi dan komponen latihan praktis, di antaranya, aneka tabel, kerangka untuk latihan interaktif, bacaan dengan iringan soal-soal, tautan ke sumber-sumber lain di internet, ruang untuk pemuatan gambar, citra dan potongan film, serta banyak fitur lagi. Pendeknya, dengan mudah *Canvas* memungkinkan para guru dan siswa berinteraksi secara dinamis dengan cara “tembus tembok”, artinya, di luar ruang kelas.

Ruang kelas pun dapat diwujudkan secara digital dengan berbagai aplikasi, di antaranya, *Skype*, *Zoom*, dan *WebEx*. Tembok sekolah dan ruang kelas dalam wujudnya yang lama luluh-lantak dan menghilang. Dengan aplikasi *WebEx* dan sejenisnya, guru dan murid tidak hanya dapat berinteraksi secara aktif—berhadapan muka—dalam lingkungan digital yang fleksibel, tetapi juga dapat menjangkau lokasi jauh, termasuk lokasi di luar negeri. *WebEx* memungkinkan guru dan pemelajar di Indonesia berhubungan langsung dengan guru dan murid di Malaysia, misalnya, yang membuka pintu terhadap pemakai ragam bahasa yang berkerabat erat dengan bahasa Indonesia, tetapi yang lingkungan budaya dan lingkungan politiknya berbeda.

Dengan semakin terjangkaunya harga alat-alat tertentu dan mudahnya cara pembelian, guru dan siswa mengalami gejala “pendemokrasian teknologi digital”. Terkait dengan perkembangan ini, ada satu studi kasus yang mencolok mata, yaitu kamera video, khususnya kamera video yang menjadi fitur umum pada telepon genggam. Alat kecil ini muncul dengan iringan perangkat lunak penyuntingan yang murah dan mudah digunakan, di antaranya, *iMovie* (untuk sistem operasi Mac iOS), *Power Director* (untuk sistem operasi Windows) dan *VSDC* (untuk sistem operasi Android di samping Mac dan Windows). Tersedia pula aneka ragam situs internet—*Facebook*, *Vimeo*, *YouTube*, *Instagram*, dan *Twitter*—yang dengan cepat dan mudah, tanpa biaya besar, menjadi ajang bagi penyebarluasan hasil film yang dibuat.

### **Tatapan Diktator Sang Lensa Kamera**

Kamera video—di antaranya, kamera video sebagaimana tersedia dalam ponsel—dapat berdampak positif pada semangat belajar dan daya cipta para siswa. Tatapannya ibarat tatapan diktator yang mampu memaksakan kehendaknya pada “rakyatnya”, para siswa. Apabila siswa merasa berada dalam tatapan kamera, umumnya perangai dan tingkah laku mereka berubah. Mereka beraksi seolah-olah bermain sandiwara. Mereka memasang raut muka yang dibuat-buat, mirip topeng atau mimik aktor. Tiba-tiba mereka dapat berbicara dengan suara lebih lantang dan bening. Mereka memandang ke sana-kemari dengan pandangan mata yang tegas, malu, kocak, atau sombong penuh percaya diri.

Mata kamera dianggap seolah-olah menjadi mata pandang sidang publik maka anak didik kita berupaya menampilkan dirinya “di muka umum” sebagai penutur kompeten yang mampu berbicara dengan baik, benar, dan runtut.



Ponsel menjadi senjata ampuh dalam upaya menguasai bahan ajar dalam bidang penguasaan bahasa. Di bawah tatapan lensa, kemampuan berkonsentrasi meningkat. Apabila kamera digunakan di ruang kelas, murid jauh lebih rajin memusatkan perhatiannya pada bahan ajar yang sedang dilatih. Apabila seorang pelajar dapat “berpamer” dengan bermain di muka kamera, ia pun akan merasa ada ikatan batin dengan bahan ajar yang dipamerkan sehingga perjuangan untuk menguasainya menjadi lebih dekat di hatinya. Bahkan, bagi siswa yang pemalu atau kurang percaya diri, kamera dapat digunakan untuk berlatih dulu di rumah atau di lingkungan pribadi. Berbahasa di muka kamera berpotensi membantu mereka membina percaya diri, sifat yang menjadi unsur asasi dalam mengembangkan penguasaan bahasa yang baik.

Kuasa lensa inilah yang perlu dimanfaatkan oleh para guru dan penyusun bahan ajar.

### **Sandiwara Video sebagai Unsur Pokok Pemelajaran Bahasa**

Beraksi di muka kamera mengajak siswa bertindak teatrikal. Sikap yang demikian membuka peluang bagi penyusun bahan ajar dan para guru untuk “berselancar” di atas ombak kewibawaan yang diciptakan oleh kamera dan semangat yang dicetuskannya. Tingkah teatrikal ini harus dimanfaatkan bergandengan dengan bahan ajar yang bersifat teatrikal pula.

Guru bahasa sudah biasa memanfaatkan drama sebagai alat pengajaran yang ampuh, khususnya latihan berupa percakapan pendek dan sempalan drama kecil. Namun, di alam teknologi video, pementasan drama sebaiknya bukan sekadar selingan atau pelengkap, melainkan bersarang di pusat program pemelajaran. Pergelaran sandiwara lengkap (bukan sekadar petikan atau sempalan drama) yang divideokan dan diunggah ke internet untuk diketahui dan ditonton secara luas membuka peluang untuk peleburan bahasa dengan teknologi digital dan penggunaan senyawa itu secara kreatif.

Apabila sebuah drama panjang ditempatkan di pusat program studi bahasa, program itu memiliki fokus dan tujuan yang jelas, yaitu pementasan atau penyiaran drama yang bersangkutan. Fokus ini sangat bermanfaat sebagai dasar pemilihan, penyusunan, dan pengurutan unsur-unsur bahan ajar, baik bagi guru maupun bagi para siswa. Siswa terdorong untuk menghafal satuan-satuan bahasa yang cukup panjang. Karena sandiwara harus digelar berulang-ulang, siswa diharuskan mengucapkan perannya berulang-ulang pula dan diharuskan mendengarkan sesama pemeran mengucapkan perannya berulang-ulang. Dengan demikian, tugas menghafal (unsur mutlak dalam upaya mempelajari bahasa asing dan bahasa ibu) menjadi lebih ringan dan lebih efektif. Tambahan pula, oleh karena para siswa sedang (atau akan) ditonton, mereka harus lebih rajin memusatkan perhatiannya pada upaya menampilkan dirinya sebagai penutur kompeten yang mampu mengucapkan perannya dengan baik dan benar.

Di antara semua faedah pedagogis yang dihasilkan oleh pendekatan teatrikal, yang terpenting adalah peluang bagi para siswa untuk menunjukkan daya cipta dalam kaitannya dengan pemelajaran bahasa. Apabila seorang pelajar merasa dapat “berpamer”, menunjukkan kreativitasnya dengan ikut serta dalam pementasan sandiwara, ia akan merasakan ikatan batin yang lebih akrab dengan bahasa yang bersangkutan sehingga perjuangan untuk menguasainya menjadi lebih dekat di hatinya. Kemampuan berbahasa “di muka umum” juga membina



kebanggaan akan bahasa yang bersangkutan. Dewasa ini upaya membina kebanggaan berbahasa Indonesia menjadi semakin penting, terutama karena bahasa Indonesia sedang mengalami pengikisan akibat munculnya semangat hebat untuk mempelajari bahasa asing.

### **Daya Cipta Para Siswa dan Pengembangan Materi Ajar**

Drama panjang sandiwara lengkap, pementasan sambung-sinambung, peragaan berkepanjangan, banyol drama wujud apa pun yang diupayakan sebaiknya disenyawakan dengan tujuan-tujuan umum pembelajaran bahasa, seperti penguasaan fonologi, tata bahasa, kosakata, kelancaran berbahasa dalam pergaulan sosial, kemampuan membaca dengan teliti, pengenalan terhadap karya sastra, serta keterampilan mengungkapkan isi hati dan isi otak secara runtut dan komunikatif dalam wujud tulisan. Dengan kata lain, latihan berbahasa di kelas dan bahasa yang terdapat dalam sandiwara yang dilatih harus terintegrasi dan berkembang sejajar sehingga saling mengokohkan.

Keharusan ini menjadi tantangan bagi para penyusun bahan ajar bahasa Indonesia beserta guru-guru. Sandiwara belum tentu dapat diangkat polos, tanpa perubahan, dari khazanah sastra pentas berbahasa Indonesia yang sudah ada. Tidak jarang sandiwara tersebut terlalu canggih, temanya tidak relevan, sulit dipentaskan, atau tidak selaras dengan tingkat umur para siswa, bahkan mungkin dirasa kekanak-kanakan. Yang menjadi kendala terbesar, yaitu sering sandiwara klasik (*Sandyakala Ning Majapahit, Prabu dan Putri, Awal dan Mira*, dan banyak lagi) bahkan yang modern pun (*Malam Jahanam, Kisah Perjuangan Suku Naga, Marsinah, Pelacur dan Sang Presiden*, dan banyak lagi) sulit disesuaikan dengan silabus dalam hal ragam bahasanya dan titik berat temanya.

Agar diterima sebagai komponen asasi dalam program pembelajaran bahasa, sandiwara harus disesuaikan dengan unsur-unsur pokok silabus yang ditetapkan negara. Dengan demikian, ia pun harus ditulis khusus, tidak diangkat atau disadur dari khazanah kesandiwaraan yang sudah ada. Setiap langkah dalam silabus menjadi bahan mentah yang perlu disulap menjadi langkah dalam sebuah alur cerita. Alur cerita yang mencerminkan dan mengungkap kembali unsur silabus berkembang—adegan demi adegan—dari elementer ke arah lebih lanjut sejalan dengan perkembangan isi silabus. Sandiwara dan silabus saling mencerminkan dan saling mengulang dan dengan demikian saling mengokohkan secara akrab.

Tentu saja, penyusunan bahan ajar yang demikian merupakan tuntutan berat bagi guru dan penyusun materi. Akan tetapi, dengan melibatkan para siswa dalam proses penulisan sandiwara, tugas itu tidak hanya menjadi ringan, tetapi juga menjadi alat pendidik yang ampuh sekali. Apabila para siswa berperan langsung dalam penulisannya, sandiwara itu menjadi ajang tempat mereka dapat mempersatukan alam minat mereka sebagai remaja dengan kepentingan negara sebagaimana dibentangkan dalam silabus. Yang terpenting dalam proses ini, para siswa menunjukkan dan mengembangkan daya cipta mereka. Dapat dipastikan daya cipta itu beraneka ragam, dari bakat penulisan, perencanaan pementasan, penyutradaraan, deklamasi, penelitian latar belakang cerita, syuting, penyuntingan video, perancangan dan pembuatan kostum, tata rias, tata latar, dan yang terpenting, mimik dan peragaan peran.

Melalui sandiwara serta pemanfaatan alat digital dan sumber digital, para siswa mata pelajaran bahasa terkoneksi dengan “budaya pengacau” global yang sedang





melanda Indonesia. Mereka menjadi terlibat secara intensif, produktif, dan berjangka panjang dalam proses penyusunan dan pemelajaran bahan ajar yang berakar dalam budaya pengacau itu. Lalu, bagaimanakah peran guru, penyusun bahan ajar tradisional, sekolah, dan negara?

### **Simpulan: Alam Digital Akan Membalik Jenjang Wibawa**

Tradisi pendidikan yang umumnya kita kenal selama ini dapat digambarkan sebagai “*explicative order*”, yaitu sistem pemelajaran yang berdasar pada upaya menjelaskan kedudukan dunia dan kewajiban siswa di dalam dunia itu. Dalam orde ini ada dua golongan utama: guru dan murid. Terdapatlah susunan hierarkis yang di dalamnya hanya guru (termasuk buku ajar, sistem persekolahan, dan negara) yang berwenang menjelaskan, yaitu merumuskan bahan ajar, mengajarkannya, dan menilai keberhasilan proses pemelajaran. Guru menjadi “penjaga pintu” dengan tugas utama menjauhkan siswa dari masalah yang dipelajarinya dan sekaligus menampilkan diri sebagai insan yang dapat membantu para siswa menjembatani jurang pengetahuan yang sengaja diciptakan sendiri oleh sang guru. Dengan kata lain, sistem pendidikan tersusun dengan tujuan utama menopang derajat guru, sekolah, orang tua, agama, dan negara. Alam digital dan pendemokrasian teknologi menghancurkan “pintu” yang dijaga oleh insan dan lembaga orde lama ini. Sekarang meratalah akses pada informasi, ide, kesenian, dan pribadi-pribadi di seluruh dunia.

Kenyataan ini akan membuat tersungas jenjang wibawa di ruang kelas. “*Explicative order*” tidak bakal mampu mempertahankan eksistensinya. Sekarang pun, banyak murid yang lebih akrab dengan alam digital daripada dengan gurunya dan kehadiran alam digital itu semakin menghimpit kita semua.

Sang ponsel gawai kecil dengan lensa diktatornya yang melekat di tangan setiap anak didik menjadi salah satu alat yang memungkinkan guru bergumul secara kreatif dengan alam digital yang tidak terelakkan. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah berpotensi merespons pada kenyataan yang semakin menghimpit ini, tetapi hanya apabila para guru bersedia merombak cara mengajarnya secara menyeluruh. Perombakan ini menuntut nyali, tekad, dan daya cipta, tidak hanya pada guru-guru, tetapi juga lebih-lebih pada para penyusun materi ajar, pengelola prodi-prodi, serta para politisi dan birokrat yang menentukan kebijakan dalam bidang pendidikan.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 3 Kelompok 1**

Pembicara : Dr. George Quinn  
Judul Makalah : “Bergawai-ria: Merenungkan Pendemokrasian Teknologi Digital dalam Pemelajaran Bahasa”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 10.30—12.00  
Moderator : Dr. Sandra Safitri Hanan  
Pencatat : 1. Dina Alfiyanti Fasa  
                  2. Ibnu Kharish

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Makalah ini membahas peran teknologi digital di alam pendidikan, wibawa guru dan sistem persekolahan, serta bahan ajar dan metodologi di ruang kelas.
2. Anak didik tidak akan menyerap informasi dari sumber yang tidak mereka hormati.
3. Wibawa berkaitan erat dengan teknologi. Teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi adalah penentu diterima atau tidaknya informasi tersebut.
4. Evolusi sumber wibawa dalam pendidikan meliputi penggunaan kelir dan blencong dalam wayang, huruf dan naskah tulisan tangan yang dibuat oleh ahli baca tulis, media pengajaran yang digunakan guru atau dosen, dan penggunaan media massa.
5. Media digital berpengaruh besar terhadap cara kita mendidik.
6. Dalam pengajaran bahasa, teknologi digital membuka peluang dan menuntut penerapan cara-cara baru. Dengan demikian, teknologi digital juga mengharuskan para tenaga pengajar menggunakannya dalam pengajaran.
7. Kamera video, termasuk yang terdapat dalam ponsel, dapat berdampak positif pada semangat belajar dan daya cipta para siswa karena tatapan kamera mengubah perangai dan tingkah laku siswa, meningkatkan daya konsentrasi siswa, dan membantu siswa pemalu membina rasa percaya diri mereka.
8. Aktivitas berupa sandiwara video yang direkam melalui ponsel juga dapat menjadi media pemelajaran dan juga sebagai pusat program karena dapat membantu pengembangan daya kreativitas siswa.
9. Sandiwara yang dapat digunakan oleh para siswa sebaiknya adalah sandiwara baru yang dibuat dan telah disesuaikan dengan isi silabus.
10. Namun, ponsel juga merupakan unsur bermasalah di ruang kelas karena dianggap dapat mengancam wibawa guru, buku teks, sistem sekolah, bahkan peran orang tua.
11. Ponsel dan gawai digital tidak akan menjadi ancaman terhadap wibawa guru, sekolah, dan orang tua jika sistem sekolah melakukan perombakan dengan melibatkan teknologi digital dalam pembuatan silabus pemelajaran.



## Tanya Jawab

### Penanya 1

Nama : Elvi Maryatul N.  
Instansi : Guru SMA di Lumajang

### Pertanyaan:

Bagaimana menanggulangi kegamangan akan dampak negatif siswa memegang ponsel?

### Jawaban:

1. Kegamangan tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Perlu keberanian bagi para guru menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran.
2. Kegamangan itu wajar, tetapi kita harus mengupayakan pemanfaatan teknologi informasi secara proporsional. Sebagai guru, kita tidak perlu merasa was-was karena perkembangan teknologi adalah hal yang pasti akan terjadi dan tidak bisa dihindari.

### Penanya 2

Nama : Syarifudin Lubis  
Instansi : Guru dari Binjai, Sumatra Utara

### Pertanyaan:

Kami sudah mengaplikasikan apa yang Prof. Quinn lakukan. Kurikulum yang kami gunakan sekarang berdasarkan teks. Saya sepakat jika teknologi hanya digunakan untuk beberapa bagian pengajaran. Permasalahan di tempat saya adalah keterbatasan penggunaan teknologi. Perlu juga ada regulasi dari pemerintah mengenai penggunaan ponsel di institusi pendidikan.

### Jawaban:

1. Bagus sekali jika para siswa dapat menulis buku, tetapi akan lebih baik jika para siswa dapat membuat blog mereka sendiri.
2. Para siswa sebaiknya dapat memproduksi keduanya, buku dan blog. Pembuatan buku dan blog harus seimbang.

### Isu-Isu Penting:

1. Perkembangan media digital berpengaruh besar pada perkembangan pendidikan.
2. Dalam pengajaran bahasa, teknologi digital membuka peluang sekaligus menuntut penerapan cara-cara baru.
3. Ponsel dan gawai digital tidak akan menjadi ancaman terhadap wibawa guru, sekolah, dan orang tua jika sistem sekolah melakukan perombakan dengan melibatkan teknologi digital dalam pembuatan silabus pembelajaran.
4. Guru saat ini merupakan fasilitator yang dituntut bersifat terbuka, adaptif, dan akomodatif.
5. Anak-anak yang lahir pada abad ke-21 merupakan *digital native* sehingga secara psikologis mereka berbeda dalam hal kebutuhan, kognitif, kebiasaan, adat-istiadat, serta budaya dan nilai.



#### 4. Tantangan Mewujudkan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang Efektif pada Era Revolusi Industri 4.0

### TANTANGAN MEWUJUDKAN PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA YANG EFEKTIF PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 *The Challenges to Realize the Effective Learning of Indonesian Language and Literature in the Industrial Revolution Era 4.0*

**Sarwiji Suwandi**

Universitas Sebelas Maret  
sarwijiswan@staff.uns.ac.id

#### **Abstrak**

Teknologi informasi menjadi basis dalam kehidupan manusia pada era Revolusi Industri 4.0. Penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas akibat perkembangan internet dan teknologi digital pada era ini menyebabkan segala hal menjadi tanpa batas. Era ini dipercaya akan mendisrupsi banyak bidang, tanpa kecuali bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Hal tersebut memunculkan banyak tantangan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Uraian dalam makalah ini berfokus pada penjelasan tentang tantangan yang dihadapi guru dan solusinya. Selain kajian literatur yang bersifat analisis kritis-komparatif, uraian dalam makalah menyajikan sejumlah hasil riset yang telah penulis lakukan yang gayut dengan kebutuhan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia abad ke-21 dan Revolusi Industri 4.0. Ada dua hasil riset pengembangan yang disajikan dalam makalah ini, yaitu Pengembangan Buku Bahasa Indonesia Berwawasan Multikultural dan Pengembangan Buku Teks Bahasa Indonesia Berbasis Kecerdasan Ekologis.

**Kata-kata kunci:** tantangan pembelajaran, bahasa Indonesia, revolusi industri 4.0, pendidikan multikultural, kecerdasan ekologis

#### **Abstract**

*Information technology is the basis of human life in the Industrial Revolution 4.0 era. Unlimited use of computational and data due to the development of the internet and digital technology in this era has caused everything to be unlimited. This era is believed to be able to disrupt many fields, including the field of Indonesian language and literature education. As a result, it raises many challenges in learning this discipline. The description in this paper focuses on explaining the challenges faced by teachers and its solutions. This paper not only presents the literature study of a critical-comparative analysis, but also a number of research conducted by the authors that are consistent with the needs in the learning of Indonesian language and literature in the 21<sup>st</sup> century and Industrial Revolution 4.0 era. Two results of development research presented in this paper, namely the Development of Multicultural Insightful Indonesian Language Handbook and Indonesian Language Textbook based on Ecological Intelligence.*



**Keywords:** *challenges of learning, Indonesian language, industrial revolution 4.0, multicultural education, ecological intelligence*

## PENDAHULUAN

Salah satu wacana menarik yang akhir-akhir ini diperbincangkan banyak kalangan—termasuk kalangan pendidik—adalah Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 atau Revolusi Industri Keempat adalah suatu era yang memandang teknologi informasi sebagai basis dalam kehidupan manusia. Penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas akibat perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin menyebabkan segala hal menjadi tanpa batas (*borderless*). Era ini juga akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tanpa kecuali bidang pendidikan.

Seturut dengan itu, proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dimungkinkan juga akan mengalami disrupsi. Dengan terbukanya arus informasi dan komunikasi saat ini, pengembangan pola pembelajaran campuran (*blended learning*) merupakan suatu alternatif yang bisa dipilih dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

Untuk dapat membelajarkan bahasa dan sastra Indonesia dengan menggunakan pembelajaran campuran, seorang guru perlu memiliki pengetahuan teknologi (*technological knowledge*), yakni pengetahuan tentang bagaimana menggunakan *hardware* dan *software* dan menghubungkan keduanya. Guru dituntut memiliki kompetensi tentang isi materi pelajaran (*content knowledge*). Selain itu, sudah barang pasti guru harus memiliki kompetensi tentang pengetahuan pedagogis (*pedagogical knowledge*), yakni pengetahuan tentang karakteristik siswa, teori belajar, model atau metode pembelajaran, serta penilaian proses dan hasil belajar.

Guru bahasa dan sastra Indonesia diharapkan mampu memberikan kepada siswa keterampilan yang dibutuhkan oleh Revolusi Industri Keempat, yaitu kemampuan teknis, kreativitas, dan pemecahan masalah yang inovatif. Jika disadari bahwa Revolusi Industri 4.0 bertalian dengan banyak variabel dan menuntut respons yang kompleks, tanggung jawab yang dipikul guru tidak ringan. Tanggung jawab tersebut sepatutnyalah dipandang guru sebagai tantangan yang harus ditunaikan.

Tantangan tersebut makin menarik manakala guru menyadari bahwa para siswa abad ke-21 datang ke sekolah dengan pengalaman dan harapan yang berbeda dari para siswa pada abad ke-20, tatkala guru-guru yang sekarang dahulu masih menjadi siswa. Pengguna digital yang pintar, multimedia, *multitasking* ini menavigasi kehidupan sehari-hari yang sangat berbeda dengan siswa beberapa dekade yang lalu. Mereka pun belajar dengan gaya dan cara yang berbeda. Untuk itu, penumbuhkembangan minat dan motivasi belajar serta bentuk fasilitasi belajar bagi mereka pun tentu berbeda. Pendekatan dan pola interaksi yang dipraktikkan guru pun berbeda. Para siswa lebih membutuhkan guru yang terbuka, adaptif, dan akomodatif terhadap berbagai kebutuhan siswa, baik untuk penyediaan materi ajar, penggunaan model pembelajaran dan teknik penilaian, maupun penciptaan atmosfer belajar yang menantang.

Persoalan pokok yang hendak dikaji dalam makalah ini adalah tantangan untuk guru dalam mewujudkan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang efektif pada era Revolusi Industri 4.0. Tantangan tersebut akan dapat dijawab



dengan baik manakala guru memiliki pemahaman tentang karakteristik siswa pada era industri 4.0. Spektrum tantangan yang dihadapi guru bahasa dan sastra Indonesia sangat luas. Uraian dalam makalah ini lebih dibatasi pada tantangan guru dalam mengembangkan bahan ajar.

### **1. Peserta Didik Abad Ke-21 dan Pola Pikir Guru**

Karakteristik peserta didik atau siswa pada era digital sangat berbeda dengan era saat pendidik atau guru hidup di zamannya. Prensky menyatakan bahwa generasi yang lahir pada era digital ini adalah *digitalnative*, yang artinya, sejak lahir mereka telah dilingkupi oleh berbagai macam peralatan digital seperti komputer, *videogame*, *digitalmusic player*, kamera video, telepon seluler, serta berbagai macam perangkat khasera digital (Prensky, 2001). Kondisi ini berpengaruh besar pada psikologi siswa dan anak-anak muda bangsa ini. Secara psikologis, mereka berada pada perkembangan peta kognitifnya, perkembangan beragamnya kebutuhan, perubahan pada kebiasaan, adat-istiadat, budaya, dan tata nilainya. Seiring dengan perkembangan zaman, secara tidak langsung terjadi pergeseran nilai dan makna dalam cara memandang suatu permasalahan (Suwandi, 2018).

Komputer dan internet dapat dijadikan sarana yang efektif bagi siswa untuk belajar, menambah pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan berbahasa. Namun, tidak bisa dimungkiri adanya kenyataan bahwa para siswa dan generasi muda banyak membelanjakan waktu mereka untuk sekadar “ngobrol” melalui berbagai media sosial (medsos) yang ada, seperti *face book*, *whatsapp*, *twitter*, Instagram, dan Path. Penelusuran terbatas pengguna medsos di kalangan siswa menunjukkan bahwa masih banyak di antara mereka yang belum memanfaatkan media tersebut untuk menambah atau memperkaya ilmu pengetahuan. Aktivitas membaca mereka belum terarah pada bacaan-bacaan yang bermutu. Aktivitas menulis mereka pun masih lebih banyak untuk keperluan *chatting* dan menulis *caption* (Suwandi, 2015a, 2017a). Mereka belum secara sadar dan terencana mengunjungi laman-laman yang memiliki kredibilitas tinggi—seperti laman Perpustakaan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan jurnal ilmiah dari berbagai perguruan tinggi—yang dapat memberi informasi atau pengetahuan yang sah. Oleh karena itu, wajar jika keterampilan berbicara dan menulis mereka juga belum baik.

Menyadari kebutuhan siswa tersebut, pengembangan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengacu pada tiga konsep pendidikan abad ke-21, yaitu keterampilan abad ke-21 (*21<sup>st</sup> century skills*), pendekatan saintifik (*scientific approach*), dan penilaian autentik (*authentic assesment*). Implikasi penting bagi guru dan sekolah adalah bahwa pembelajaran harus merujuk pada empat karakter belajar abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, kolaborasi, dan komunikasi atau yang dikenal dengan *4C* (*critical thinking and problem solving, creativity and innovation, collaboration, and communication*).

Secara umum, terdapat 18 kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan pada era Revolusi Industri 4.0. Kemampuan-kemampuan itu adalah (1) persepsi sensorik, (2) kemampuan mengambil informasi, (3) kemampuan mengenali pola-pola atau kategori-kategori, (4) kemampuan membangkitkan pola/kategori baru, (5) kemampuan memecahkan masalah, (6)



kemampuan memaksimalkan dan merencanakan, (7) kemampuan mencipta (kreativitas), (8) kemampuan mengartikulasikan atau menampilkan *output*, (9) kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak, (10) kemampuan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan gagasan, (11) kemampuan menggunakan bahasa untuk memahami gagasan, (12) kemampuan mengindra sosial dan emosional, (13) kemampuan membuat pertimbangan sosial dan emosional, (14) kemampuan menghasilkan *output* emosional dan sosial, (15) kemampuan motorik halus/ketangkasan, (16) kemampuan motorik kasar, (17) kemampuan navigasi, dan (18) kemampuan mobilitas (Yamnoon, 2018).

Sejalan dengan itu, pola pikir dan perilaku guru hendaknya bersesuaian dengan pola pikir yang dikembangkan dalam Kurikulum 2013 (Permendikbud No. 68 Tahun 2013). Tuntutan pembelajaran berpusat pada siswa merupakan sebuah keniscayaan. Siswa harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama. Pembelajaran bersifat interaktif, yakni terjadi interaksi antara guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan alam, dan sumber/media lainnya. Pembelajaran terisolasi harus diubah menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet). Pembelajaran aktif-mencari perlu secara terus-menerus diperkuat melalui penerapan pendekatan saintifik. Pengarusutamaan pembelajaran kritis harus dilakukan guru. Pembelajaran dengan alat tunggal harus digeser menjadi berbasis multimedia. Pembelajaran harus berbasis pada kebutuhan pengguna (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap siswa.

## 2. Tantangan Guru pada Era Digital

Perubahan besar yang terjadi dalam cara menyimpan dan mengakses informasi dengan komputer dan teknologi digital akan mengubah banyak aspek pendidikan dan pembelajaran. Hal demikian akan menyebabkan para pendidik meredefinisikan berbagai aspek pembelajaran dan tugas-tugas yang mereka berikan kepada siswa. Demikian pula ruang fisik yang disebut sekolah dan kelas akan terus berubah pada masa mendatang. Organisasi dan akuntabilitas pembelajaran juga mengalami perubahan. Namun, jika kita merujuk pada sejarah, perubahan itu akan terjadi secara perlahan-lahan. Ditegaskan oleh Arend (2008) bahwa sekolah kemungkinan besar akan terus berbasis masyarakat dan guru akan terus melaksanakan tugas pembelajaran kepada kelompok-kelompok anak di ruang-ruang kelas.

Tantangan yang dihadapi guru pada era komputer dan teknologi digital makin kompleks. Arends (2008) berpandangan bahwa tantangan mengajar bagi guru abad ke-21 mencakupi (1) mengajar dalam masyarakat multikultural, (2) mengajar untuk mengonstruksi makna, (3) mengajar untuk pembelajaran aktif, (4) mengajar dan akuntabilitas, (5) mengajar dan pilihan, (6) mengajar dengan pandangan baru tentang kemampuan, dan (8) mengajar dan teknologi.

Mendidik dan mengajar anak-anak dengan latar belakang bahasa dan budaya yang beragam dan dengan kebutuhan khusus menuntut guru agar memiliki repertoar strategi dan metode efektif yang jauh melampaui apa yang sebelumnya dituntut dari guru. Guru harus mampu mendiferensiasi kurikulum dan pengajarannya agar lebih sesuai dengan mereka yang mungkin merasa bahwa sekolah amat menyulitkan dan tidak relevan dengan kehidupannya.



Salah satu perspektif objektif yang mendapat tempat terhormat dalam lingkaran pendidikan selama dua dekade terakhir adalah perpektif konstruktivisme. Alih-alih melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang sepenuhnya diketahui, tetap, dan dapat ditularkan; perpektif konstruktivisme berpandangan bahwa pengetahuan agak bersifat personal dan maknanya dikonstruksikan pelajar melalui pengalaman. Belajar adalah kegiatan sosial dan kultural tempat pelajar mengonstruksikan makna yang dipengaruhi oleh interaksi antara pengetahuan sebelumnya dan peristiwa belajar baru.

Konsekuensi dari pandangan bahwa belajar merupakan kegiatan aktif dalam membangun makna, guru perlu memberikan dorongan kepada siswa untuk menggunakan otoritasnya dalam membangun gagasannya. Tanggung jawab belajar berada dalam diri siswa (Suwandi, 2013), tetapi guru bertanggung jawab menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi, dan tanggung jawab siswa untuk belajar sepanjang hayat.

Siswa akan terus belajar secara aktif jika kondisi pembelajaran dibuat menyenangkan, nyaman, dan jauh dari perilaku yang menyakitkan perasaan siswa. Diperlukan suasana belajar yang menyenangkan karena otak tidak akan bekerja optimal bila perasaan dalam keadaan tertekan. Untuk itu, sebagaimana ditegaskan Brown (2000), guru memiliki tugas penting membimbing dan memfasilitasi siswa dalam belajar.

Mengajar dan akuntabilitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Guru yang memiliki persiapan dan kompetensi minimal tentu tidak diharapkan, terlebih pada era sekarang. Guru dituntut memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial yang ditunjukkan dengan sertifikat pendidik. Guru dituntut memiliki banyak kemampuan, antara lain, kemampuan membantu siswa melihat berbagai pola makna, kemampuan mendukung kreativitas sejati siswa, dan kemampuan belajar setiap saat karena pengetahuan yang dibutuhkan senantiasa berubah dengan kehadiran berbagai tantangan baru dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan dan kemajuan teknologi mendorong para futuris berpendapat bahwa sekolah formal, seperti yang dirancang dan dipraktikkan sekarang ini akan ketinggalan zaman dalam upaya pembelajaran, seperti delman di tengah sistem transportasi modern. Hampir semua hal yang dilakukan guru dewasa ini dipengaruhi oleh teknologi dan betapa banyaknya aspek pengajaran yang dapat dipengaruhi oleh teknologi. Jika demikian, sensitivitas dan kemampuan guru dalam bidang teknologi menjadi faktor determinan keberhasilan pembelajaran yang dilakukan.

Era digital menuntut guru bermetamorfosis dari guru biasa menjadi guru luar biasa. Guru yang tidak saja melek teknologi memiliki pengetahuan luas dan kecakapan/keterampilan tinggi di bidang yang diajarkan serta memiliki kemampuan memilih dan menggunakan metode atau strategi pembelajaran; tetapi juga merupakan guru yang, menurut Suwandi (2013), mampu memerankan diri sebagai model serta menginspirasi para peserta didik.

Guru hendaknya berupaya secara terus-menerus meningkatkan kemampuannya untuk menjadi guru hebat yang mampu menginspirasi siswa agar mereka terlibat secara aktif, kooperatif, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Harmin dan Toth (2012) menyarankan lima potensi siswa yang dapat diarahkan guru, yaitu martabat (*dignity*), energi (*energy*), manajemen diri (*self*





*management*), komunitas (*community*), dan kepedulian (*awareness*) yang disingkat *DESCA*. Semua siswa dilahirkan dengan kemampuan hidup dan dengan martabat melakukan semua tugasnya dengan berenergi, melakukan manajemen diri dengan semestinya, bekerja dengan komunitas orang lain, dan peduli terhadap segala hal yang terjadi di sekitar mereka.

Semua siswa memiliki kemampuan bawaan untuk hidup dan bekerja penuh harga diri, begitu pula dengan kita. Selain itu, jauh di dalam diri siswa, mereka ingin hidup dan bekerja dengan penuh martabat. Mereka tidak ingin diremehkan, direndahkan, dianggap tidak penting, dan tidak berharga. Untuk itu, tugas guru jika ingin memberi inspirasi kepada siswa agar secara utuh menjadi pelajar aktif adalah menyelenggarakan kelas dengan cara yang nyaman dan mengasah. Guru bahasa Indonesia hendaknya tidak menuntut hasil terlalu cepat. Guru harus banyak memberi latihan berbahasa dan kegiatan apresiasi sastra kepada siswa. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik tentu perlu diciptakan proses pembelajaran yang baik dan bermakna.

Siswa memiliki kemampuan alamiah menjalani hidup dengan penuh semangat. Mereka ingin menjalani hidup dengan penuh energi. Mereka merasa tersiksa jika harus tetap duduk atau berdiri terlalu lama, tanpa ada banyak kegiatan. Untuk itu, guru perlu memberi banyak tantangan kepada siswa untuk bereksprosi dengan bahasa.

Semua orang memiliki kemampuan manajemen diri dan guru hendaknya mengembangkan kemampuan tersebut dengan baik pada diri siswa. Guru memberi keleluasaan kepada siswa untuk memilih sendiri rekan mereka untuk mengerjakan tugas; memasukkan beberapa pilihan dalam setiap pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada siswa; dan meminta siswa membuat rencana pribadi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa melalui penilaian portofolio. Siswa didorong agar memiliki kemandirian dalam mengembangkan kemampuan berbahasa.

Para siswa, sebagaimana kita semua, memiliki kemampuan bergaul dan berhubungan baik dengan orang lain. Jika guru ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, guru perlu menerapkan *learning community*. Pembelajaran kooperatif sangat perlu diterapkan dalam pembelajaran bahasa.

Siswa memiliki sifat bawaan selalu ingin tahu. Mereka tidak dilahirkan untuk menjadi orang yang membosankan. Sebaliknya, mereka memiliki sifat alamiah menghindari rasa bosan. Untuk itu, guru harus berusaha menciptakan situasi siswa dalam keadaan siap dan penuh rasa ingin tahu. Guru hendaknya selalu berupaya meningkatkan daya kemelitan siswa. Pendekatan induktif dalam pembelajaran lebih baik diterapkan daripada pendekatan deduktif. Penerapan pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan kemampuan siswa dalam merekonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat dianjurkan. Siswa terus-menerus dimotivasi supaya memiliki kemampuan menanya dan menemukan.

### **3. Tantangan Pemilihan dan Pengembangan Bahan Ajar**

Guru memiliki peran yang sangat strategis sebab keberadaannya sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Guru merupakan pribadi yang harus mampu menerjemahkan dan menjabarkan nilai-nilai dalam kurikulum dan mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Pendidik berperan sangat penting dalam mengarahkan dan memfasilitasi pembelajaran agar peserta didik mampu mencapai tujuan



sebagaimana digariskan dalam kurikulum serta mampu memenuhi kebutuhan pengembangan diri mereka.

Sebagai pendidik profesional, guru di dalam pembelajaran sangat perlu melakukan pengembangan materi ajar. Kompetensi profesional guru ini harus secara terus-menerus diasah dan ditingkatkan. Dalam konteks implementasi Kurikulum 2013, sungguhpun buku ajar telah disediakan oleh pemerintah, kekritisian guru terhadap buku ajar sangat diharapkan. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab guru adalah apakah buku tersebut telah memenuhi kebutuhan siswa. Jika ditilik dari aspek sosio-kultural, misalnya, kebutuhan siswa di banyak sekolah di seantero Nusantara ini bisa berbeda-beda, kebutuhan siswa bisa jadi sangat beragam. Jika demikian, pengembangan bahan ajar ini sangat penting mengingat bahan ajar yang tersedia belum tentu sesuai dengan kebutuhan siswa, baik ditilik dari segi keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, maupun karakteristik siswa.

Dalam praktik pembelajaran bahasa, pada umumnya orang mengasosiasikan istilah bahan ajar bahasa (*language-learning materials*) dengan buku ajar karena itulah pengalaman utama mereka menggunakan bahan (Suwandi, 2017b). Tomlinson menggunakannya untuk merujuk pada sesuatu yang digunakan oleh guru atau peserta didik untuk memudahkan pembelajaran bahasa. Bahan ajar dengan demikian dapat berupa video, DVD, *e-mail*, YouTube, kamus, buku tata bahasa, buku kerja, atau latihan yang difotokopi. Bahan ajar dapat pula berupa surat kabar, paket makanan, foto, pembicaraan langsung dengan mengundang penutur asli, instruksi yang diberikan oleh seorang guru, dan tugas yang tertulis pada kartu atau diskusi di antara peserta didik (Tomlinson, 2011). Bahan ajar adalah sesuatu yang sengaja digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan/atau pengalaman berbahasa dan bersastra peserta didik.

Haruslah diakui, khususnya di Indonesia, bahwa buku merupakan bentuk bahan ajar yang paling banyak dijumpai dan digunakan guru; dan karena itu pentingnya buku dalam pembelajaran tidak bisa dibantah. Buku pelajaran, menurut Cunningsworth (1995), hendaknya dipandang sebagai sebuah sumber dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Buku pelajaran memiliki peran ganda dalam pembelajaran bahasa dan dapat berfungsi sebagai (1) sumber bahan presentasi lisan atau tertulis; (2) sumber aktivitas bagi praktik dan interaksi komunikatif siswa; (3) sumber referensi untuk siswa mengenai aspek kebahasaan (tata bahasa, kosakata, pengucapan, dll.); (4) sumber rangsangan dan ide bagi aktivitas bahasa kelas; dan (5) silabus (dalam buku terdapat tujuan belajar yang telah ditentukan).

Jelaslah bahwa buku sebagai bahan ajar memiliki peran penting dalam pembelajaran, bahkan dapat dikatakan merupakan salah satu penentu kualitas pembelajaran. Untuk itu, guru memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memilih dan mengembangkan buku yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini penting mengingat tidak semua buku yang tersedia sesuai dengan kebutuhan siswa.

Berkenaan dengan pemilihan buku sebagai bahan ajar, ada sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan, yakni prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Relevansi mengacu pada pengertian bahwa bahan ajar hendaknya berkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Konsistensi atau keajegan mengacu pada pengertian bahwa jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa mencakup empat aspek keterampilan



berbahasa dan apresiasi sastra, bahan ajar yang harus diajarkan juga harus konsisten dengan cakupan tersebut. Kecukupan mengacu pada pengertian bahwa bahan ajar hendaknya memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Bahan yang terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, bahan yang terlalu banyak akan membuang-waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya dan akan memberatkan siswa.

Sementara itu, menurut Cunningsworth (1993), ada delapan hal yang perlu diperhatikan dalam memilih buku pelajaran, yaitu (1) tujuan buku teks pelajaran dan pendekatan yang digunakan (*aims and approaches*), (2) bentuk dan pengorganisasian atau sistematika penyajian (*design and organization*), (3) bahasa yang digunakan (*language content*), (4) keterampilan yang diharapkan (*skills*), (5) topik atau tema yang dipilih (*topic*), (6) metodologi atau cara yang digunakan dalam penyusunan buku (*methodology*), (7) buku pegangan yang digunakan guru (*teacher's book*), dan (8) faktor kepraktisan (*practical considerations*).

Sebuah buku ajar yang baik tentu harus ditulis dengan bahasa yang baku, sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh pembelajar. Sebaiknya digunakan notasi-notasi dan istilah-istilah yang lazim dan banyak digunakan di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, perlu ditambahkan bahwa untuk lebih memudahkan memahami substansi, bahan ajar perlu dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar-gambar. Hal ini senada dengan pendapat Gabrielatos (2004) bahwa buku pelajaran tidak dapat digunakan bila tidak memiliki gambar atau ilustrasi.

Selain kemampuan memilih, guru juga dituntut memiliki kemampuan mengembangkan bahan ajar. Menurut Tomlinson (2011), pengembangan bahan ajar dapat dipandang sebagai bidang kajian atau usaha praktis. Sebagai bidang kajian, pengembangan bahan ajar mempelajari prinsip dan prosedur perancangan, implementasi, dan evaluasi bahan ajar bahasa. Sebagai usaha praktis, hal itu mengacu pada upaya penulis, guru, atau peserta didik menyediakan sumber masukan bahasa untuk mengeksplorasi sumber-sumber tersebut dengan cara memaksimalkan kemungkinan asupan dan merangsang hasil yang diharapkan. Dengan perkataan lain, penyediaan informasi dan/atau pengalaman bahasa dirancang untuk mempromosikan pembelajaran bahasa. Idealnya, dua aspek pengembangan bahan ajar bersifat interaktif sehingga kajian teoretis terinformasikan dalam pengembangan dan penggunaan bahan ajar.

Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan guru dalam pengembangan bahan ajar. Selain faktor pengembangan kemampuan berbahasa dan apresiasi sastra, ada sejumlah faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti pendidikan berwawasan multikultural dan pendidikan yang berbasis kecerdasan ekologis.

#### **4. Bahan Ajar Bahasa Indonesia Berwawasan Pendidikan Multikultural**

Kesadaran bahwa Indonesia adalah negara multikultural dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural harus dimiliki guru bahasa Indonesia. Kesadaran tersebut akan mendorong guru mendesain pendidikan bahasa dan sastra Indonesia bermuatan pendidikan multikultural. Pendidikan berperan penting untuk menghasilkan generasi multikultur (Suwandi, 2013), yaitu generasi yang menghargai perbedaan, menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan.



Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam suasana multikultural menuntut guru memiliki pemahaman lintas budaya. Guru perlu memiliki wawasan yang cukup tentang bagaimana seharusnya menghargai keragaman bahasa agar segala sikap dan tingkah lakunya menunjukkan sikap *egaliter* dan selalu menghargai perbedaan bahasa yang ada. Dengan wawasan tentang keberagaman bahasa (dan tentu budaya) guru akan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah yang menyangkut adanya diskriminasi bahasa di dalam maupun di luar kelas.

Pendidikan multikultural sebagai sebuah proses reformasi sekolah yang komprehensif dan pendidikan untuk semua dicirikan oleh tujuh sifat dasar, yaitu pendidikan antirasial, pendidikan dasar, pendidikan untuk semua siswa, pendidikan yang merembes melalui kurikulum, pendidikan untuk keadilan sosial, pendidikan sebagai sebuah proses, dan pedagogi kritis. Nieto menandakan bahwa semua anak memerlukan pendidikan multikultural agar mereka siap berpartisipasi dalam dunia yang beragam tempat mereka menjadi warga negara (Nieto, 2002).

Pernyataan Nieto sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural yang dicetuskan oleh Parkers. Menurut Parkers (dalam Mwonga, 2005), tujuan utama pendidikan multikultural adalah *“to improve race relations and to help all students acquire the knowledge, attitudes, and skills needed to participate in crosscultural interactions and in personal, social, and civic action that will make our nation more democratic and just”* (hlm. 4). Parkers menekankan pentingnya relasi pendidikan multikultural dengan masyarakat demokratis dan plural.

Mengutip pendapat Lee dan Greene, Abrams dan Gibson (2007) merumuskan tiga elemen dasar dalam pendidikan multikultural, yakni (1) *cultural awareness*, (2) *cultural-specific knowledge*, dan (3) *skills*. Pencapaian tujuan tersebut harus ditempuh melalui berbagai cara, seperti peningkatan kesadaran diri siswa, penguatan kemampuan refleksi diri, dan pengenalan pola pembelajaran berbasis multikultural. Salah satu hal yang mendapatkan penekanan dalam mencapai tujuan pendidikan multikultural tersebut adalah pemakaian buku pelajaran (*text book*) yang diarahkan pada pengenalan berbagai ragam budaya yang dimiliki.

Untuk mencapai hasil tersebut, Banks (1993 dan 2010) mencetuskan lima dimensi pendidikan multikultural, yakni pengintegrasian materi, proses pengonstruksian pengetahuan, penyesuaian metode pembelajaran, pereduksian prasangka, serta penguatan budaya sekolah dan struktur sosial. Pengintegrasian materi memandatkan kepada guru untuk memanfaatkan potensi budaya yang dimiliki di dalam pembelajaran. Pengonstruksian pengetahuan menugasi guru untuk memberikan konsep pemahaman kepada siswa tentang berbagai budaya yang berbeda-beda dan mengarahkan siswa membentuk perilaku positif terhadap perbedaan tersebut. Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran multikultural. Prasangka dapat direduksi dengan memberikan pemahaman, penghargaan, dan penghormatan terhadap berbagai budaya, seperti agama, suku, kelas sosial, dan sebagainya. Penguatan budaya sekolah dan struktur sosial dapat diterapkan dengan memberikan konsep-konsep yang memungkinkan peserta didik dapat berpartisipasi secara harmonis dalam aktivitas di sekolah serta mampu menganalisis berbagai struktur sosial rasial yang terjadi di masyarakat.

Sangatlah masuk akal bahwa pembelajaran bahasa Indonesia perlu berwawasan multikultur karena bahasa dan kebudayaan memiliki hubungan yang



erat. Bahasa, menurut Kramsch (1998), merupakan simbol realitas budaya. Bahasa merupakan suatu sistem tanda yang dapat dilihat sebagai pemilikan sebuah nilai budaya. Pengguna bahasa mengenali dirinya dan orang lain melalui bahasa yang digunakannya. Mereka berpandangan bahwa bahasa mereka adalah simbol identitas masyarakat. Larangan atau pembatasan penggunaan bahasa oleh komunitas sering dipahami penutur sebagai penolakan terhadap kelompok sosial dan budaya mereka.

Fakta bahasa sebagaimana dijelaskan di atas mengindikasikan bahwa dalam pembelajaran bahasa, pendidik tidak boleh hanya mengutamakan aspek-aspek kebahasaan tanpa melibatkan aspek sosial budaya. Penekanan pada hal kebahasaan akan melahirkan siswa yang mampu menguasai materi, tetapi tidak mampu berkomunikasi dalam situasi yang sebenarnya.

Terselenggaranya pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berwawasan pendidikan multikultural membutuhkan bahan ajar yang sesuai. Berbeda dari tuntutan tersebut, berdasarkan hasil penelitian Suwandi, Rohmadi, dan Jubagyo (2013) yang mengkaji buku pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP, baik buku yang digunakan untuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan maupun Kurikulum 2103, ditemukan bahwa buku-buku yang tersedia belum mengakomodasi secara memadai nilai-nilai pendidikan multikultural. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar berwawasan pendidikan multikultural perlu dilakukan guru. Nilai pendidikan multikultural dapat diintegrasikan dalam wacana atau teks, latihan, tugas, dan soal yang harus dikerjakan siswa.

## **5. Bahan Ajar Bahasa Indonesia Bermuatan Kecerdasan Ekologis**

Salah satu faktor penting pengembangan Kurikulum 2013 adalah tantangan eksternal, yang, antara lain, terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, serta perkembangan pendidikan di tingkat internasional (Permendikbud No. 68 Tahun 2013). Untuk itu, guru harus pula memperhatikan dan mengakomodasi berbagai tuntutan yang bersifat lebih makro serta berbagai kebutuhan peserta didik, baik pada skala lokal, nasional, maupun global.

Mengacu pada kerangka dasar pengembangan Kurikulum 2013 tersebut, upaya pelestarian lingkungan selayaknya menjadi perhatian semua elemen pendidikan. Pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran IPA atau Sains, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua guru mata pelajaran, termasuk guru Bahasa Indonesia.

Kita sekarang menghadapi masalah lingkungan yang serius, termasuk pemanasan global, penipisan ozon (Kılınc, 2010), dan kepunahan sejumlah spesies, yang semuanya mengancam keberlanjutan hidup (Saribas, Teksoz, & Ertepina, 2014). Menurut Swim, Clayton, & Howard (2011), fenomena perubahan lingkungan merupakan persoalan yang membutuhkan pemikiran serius. Musibah banjir dan erosi akibat penebangan hutan, krisis energi, polusi atas tanah, pertambahan jumlah penduduk, masalah pengangguran, lemahnya status pendidikan, masalah kesehatan air dan udara, menurunnya kualitas hidup manusia, dan fenomena pemanasan global berdampak pada anomali iklim dan panas bumi yang ekstrem.

Penanaman sikap dan perilaku merawat lingkungan perlu diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Buku—sebagai faktor penting dalam



pembelajaran—dapat menjadi wahana penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif kepada anak tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Melalui buku pelajaran yang berbasis nilai-nilai cinta terhadap alam dan lingkungan, anak diarahkan dan dibimbing untuk memiliki kecerdasan ekologis (*ecological intelligence*), yakni menjadikan anak mampu menempatkan diri sebagai kontrol terhadap lingkungannya (Suwandi, Yunus, Rahmawati, 2016).

Buku atau bahan ajar bahasa Indonesia yang tersedia belum memberikan perhatian yang cukup pada upaya menjaga dan melestarikan lingkungan (ekosistem). Berdasarkan penelitian terhadap buku ajar siswa SMP, Suwandi, Yunus, dan Rahmawati (2016, 2017a) menyimpulkan bahwa buku pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP pada umumnya masih lebih dominan menyajikan hal-hal yang bersifat pengetahuan dan belum menekankan internalisasi nilai kecerdasan ekologis serta penerapannya, baik berupa adaptasi tingkah laku terhadap lingkungan, pemecahan masalah yang timbul dari dampak lingkungan, pengelolaan/pelestarian sumber daya alam, maupun pemanfaatan lingkungan secara positif.

Kondisi tersebut mendorong penulis mengembangkan buku ajar bahasa Indonesia berbasis kecerdasan ekologis; buku teks bahasa Indonesia yang disusun tidak saja memperhatikan pengembangan keterampilan berbahasa dan apresiasi sastra, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kecerdasan ekologis. Pengintegrasian nilai kecerdasan ekologis dalam buku teks bahasa Indonesia disajikan dalam wacana, latihan dan tugas, soal, dan di bagian-bagian lain, seperti judul, prakata, dan petunjuk. Selain itu, dalam buku tersebut juga dikemukakan kasus-kasus yang berkaitan dengan berbagai nilai kecerdasan ekologis (Suwandi, Yunus, dan Rahmawati, 2017b).

Hasil eksperimen yang dilakukan di sejumlah SMP di Surakarta menunjukkan bahwa penggunaan Buku Teks Bahasa Indonesia Berbasis Kecerdasan Ekologis berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku peduli lingkungan siswa (Suwandi, Yunus, dan Rahmawati, 2018). Perilaku peduli lingkungan siswa yang menjadi kajian penelitian ini difokuskan pada perilaku peduli lingkungan sekolah yang meliputi 12 indikator yang diamati, yaitu (1) respons terhadap kepedulian teman terhadap lingkungan, (2) respons terhadap teguran guru/teman atas kekurangpedulian pada lingkungan, (3) tindakan mengatasi sampah di kelas, (4) tindakan mengatasi sampah di halaman sekolah, (5) tindakan mengatasi kelas/sekolah yang kotor, (6) tindakan mengatasi keran air mengalir yang tidak diperlukan, (7) tindakan mengatasi lampu menyala yang tidak diperlukan, (8) tindakan membuang bungkus/sisa makanan, (9) tindakan mencoret-coret meja kursi, (10) tindakan mencoret-coret tembok, (11) tindakan memetik bunga yang tidak diperlukan, dan (12) tindakan memelihara tanaman sekolah.

## **PENUTUP**

Penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas pada era Revolusi Industri 4.0 akibat perkembangan internet dan teknologi digital menyebabkan segala hal menjadi tanpa batas. Era ini diyakini akan mendisrupsi banyak bidang, tanpa kecuali bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Akibatnya, banyak tantangan yang muncul dalam pembelajaran. Guru dituntut mampu memberikan kepada siswa keterampilan yang dibutuhkan oleh Revolusi Industri. Pembelajaran harus merujuk pada empat karakter belajar abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan



pemecahan masalah, kreatif dan inovasi, kolaborasi, dan komunikasi. Untuk itu, dibutuhkan sosok guru yang terbuka serta adaptif dan akomodatif terhadap berbagai kebutuhan siswa, baik dari segi penyediaan materi ajar, penggunaan model pembelajaran, penggunaan teknik penilaian, maupun penciptaan atmosfer belajar yang menantang. Guru harus memiliki kemampuan mengembangkan bahan ajar yang tidak saja berorientasi pada pengembangan kompetensi berbahasa Indonesia dan apresiasi sastra, tetapi juga mengakomodasi berbagai tuntutan yang bersifat lebih makro serta berbagai kebutuhan peserta didik, seperti pendidikan multikultural dan pendidikan ekologi. Pola pembelajaran campuran merupakan suatu alternatif yang bisa dipilih untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Penilaian autentik yang menekankan proses dan hasil pembelajaran harus diterapkan. Sebagai pendidik para guru dapat mewujudkan tantangan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, L. S. & Gibson, P. (2007). "Reframing multicultural education: Teaching white privilege in the social work curriculum," *Journal of Social Work Education*, 43(1): 149-160.
- Arends, R. I. (2008). *Learning to Teach, Belajar untuk Mengajar* (Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Banks, J. A. (1993). "Multicultural education: Historical development, dimensions, and practice," *Review of Research in Education*, 19(2): 3-49.
- Banks, J. A. (2010). "Multicultural educations: Characteristics and goals," dalam Banks dan Banks (ed.). *Multicultural Education: Issue and Perspectives 7<sup>th</sup> Edition*. United States of America: RRD Crawfordville.
- Brown, H. D. (2000). *Principles of language learning and teaching, Fourth edition*. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall Regents.
- Cunningsworth, A. (1995). *Choosing your coursebook*. Oxford: Heinemann.
- Gabrielatos, C.. (2004). "IATEFL teacher trainers and educators sig newsletter," *Session Plan: The Coursebook as A Flexible Tool*. 1, 28-31.
- Harmin, M. dan Toth, M. (2012). *Pembelajaran Aktif yang Menginspirasi, Buku Pegangan Lengkap untuk Guru Masa Kini*, (Bethari Anissa Ismayasari, penerjemah). Jakarta: Indeks.
- Kılınc, A. (2010). Can Project-based Learning Close the Gap? Turkish Student Teachers and Proenvironmental Behaviors, *International Journal of Environmental & Science Education*, 5(4): 495—509.
- Mwonga, C. (2005). Multicultural education: Education for equity and democracy. Dalam *Multicultural Education: New Path Toward Democracy*.
- Nieto, S. (2002). *Language, culture, and teaching: Critical perspective for a new century*. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*.
- Prensky, M. 2001. Digital natives, digitalimmigrants. *On the Horizon*, 9(5): 1—6.
- Suwandi, S. (2013). Peran guru bahasa Indonesia yang inspiratif untuk mewujudkan peserta didik berkarakter. Dalam Saddhono, K. et. al (ed.) *Proceeding*



- Seminar Internasional PIBSI XXXV* (hlm. 1—10). Surakarta: Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS.
- Suwandi, S., Rohmadi, M.; dan Jubagyo, H. (2013). Pendidikan multikultural dalam buku ajar bahasa dan sastra Indonesia untuk siswa sekolah menengah pertama di surakarta, *Widyaparwa*, 41(1): 29—39.
- Suwandi, S. (2015a). Meneguhkan paradigma mutu pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam Suwandi, S., Yuwono, S., Suratno, P., Woodrich, C., Rohmadi, M. (ed.) *Prosiding Konferensi Bahasa dan Sastra III* (hlm. 22—35) Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Suwandi, S. (2015b). Membangun budaya literasi untuk mengembangkan profesionalisme guru dan dosen bahasa Indonesia. Dalam Rohmadi, M dan Sulistyono, R. (ed.) *Prosiding Seminar Nasional dan Launching ADOBSI* (hlm. 11—24). Surakarta: Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia (ADOBSI).
- Suwandi, S., Yunus, A., Rahmawati, L.E. (2016). Kecerdasan ekologis dalam buku sekolah elektronik mata pelajaran bahasa Indonesia SMP. *Litera* 15(1): 23—37.
- Suwandi, S. (2017a). Mematut pembelajaran bahasa Indonesia dalam konteks masyarakat multikultural, makalah dipresentasikan pada *Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia* yang diselenggarakan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang.
- Suwandi, S. (2017b). Mengasah dan meningkatkan profesionalisme pendidik melalui pengembangan bahasan ajar bahasa dan sastra Indonesia. Dalam Suwandi, S, Rohmadi, M., Ulya, C. (ed.). *Prosiding Konferensi Nasional Bahasa dan Sastra IV* (hlm. 1—12). Surakarta: Program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Sebelas Maret.
- Suwandi, S., Yunus, A., Rahmawati, L.E. 2017a. Ecological intelligence values in Indonesian language textbooks for junior high school students. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities* 25(S): 237—248.
- Suwandi, S., Yunus, A., Rahmawati, L.E. 2017b. *Bahasa Indonesia Berbasis Kecerdasan Ekologis bagi Ssiswa SMP*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Suwandi, S. (2018). Peran guru dalam mengimplementasikan pembelajaran bahasa Indonesia. Makalah dipresentasikan pada *Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* yang diselenggarakan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali.
- Suwandi, S., Yunus, A., Rahmawati, L.E. 2018. The effectiveness of ecological Intelligence-based Indonesian language textbooks on the environmentally friendly behaviors of state junior high school students in Surakarta. The 1<sup>st</sup> International Seminar on Language, Literature and Education (ISLLE 2017). *KnE Social Sciences*, 261—267.
- Swim, J.K., Clayton, S., & Howard, G.S (2011). Human Behavioral Contribution to climate change: Psychological and contextual drivers, *American Psychologist*, 66(4): 251—264.
- Tomlinson, B. (ed.) (2011). *Materials development in language teaching, Second Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yamnoon, S. (2018). *Education 4.0, Teaching and Learning in 21st Century*. Lobbury Thailand: Thepsatri Rhajabat University.





**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28-31 Oktober 2018

**Sesi 3 Kelompok 1**

Pembicara : Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.  
Judul Makalah : “Tantangan Mewujudkan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang Efektif pada Era Revolusi Industri 4.0”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 10.30—12.00  
Moderator : Dr. Sandra Safitri Hanan  
Pencatat : 1. Dina Alfiyanti Fasa  
2. Ibnu Kharish

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Pada era teknologi informasi kita tidak bisa lagi mengasumsikan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Cara pandang seperti ini sudah harus kita tinggalkan.
2. Salah satu alternatif untuk diimplementasikan dalam pendidikan adalah penggunaan pengajaran campuran dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Guru harus memiliki pengetahuan teknologi, kemampuan kreativitas, dan kemampuan pedagogis.
4. Guru merupakan fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus bisa menyiapkan dan menyediakan media ajar yang bersifat terbuka. Silabus, misalnya, dapat diberikan kepada para siswa.
5. Guru pada abad ke-21 dituntut terbuka, adaptif, dan akomodatif.
6. Anak-anak pada abad ke-21 merupakan *digital native* sehingga secara psikologis mereka berbeda dari generasi sebelumnya dalam hal kebutuhan, kognitif, kebiasaan, adat-istiadat, serta budaya dan nilai.
7. Kegiatan pembelajaran harus bersifat dialogis dan interaktif.
8. Tantangan mengajar pada abad ke-21 adalah mengajar masyarakat multikultural, mengajar untuk mengonstruksi makna, mengajar untuk pembelajaran aktif, serta mengajar dan akuntabilitas.
9. Tanggung jawab belajar ada pada siswa, tetapi guru menjadi fasilitator dan motivator siswa agar mereka memenuhi tanggung jawab belajar.
10. Pengembangan bahan ajar dapat dilakukan dengan melihat aspek-aspek keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan karakteristik siswa.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Agus Sri Danardana  
Instansi : Badan Bahasa

**Pertanyaan:**

Kondisi di Indonesia dan Australia mungkin berbeda. Bahasa Indonesia di Indonesia menjadi momok bagi para penuturnya. Menurut saya, banyak hal yang harus dibenahi berkaitan dengan guru dan bahan ajar. Bahan ajar bagi guru



merupakan kitab suci. Dalam penyiapan bahan ajar, bahan tersebut sebaiknya memang dibuat sendiri.

**Jawaban:**

1. Guru harus berani menghadapi berbagai kritik. Jika melihat bahan-bahan ajar bahasa daerah, kebanyakan berupa daftar kata. Apabila pembelajaran hanya menggunakan hafalan saja, hal tersebut akan menjadi momok.
2. Kita harus memiliki parameter bahan ajar mana yang baik dalam pemilihan bahan ajar yang akan digunakan di kelas. Guru harus kritis dalam memilih bahan ajar yang akan digunakan.

**Isu-Isu Penting:**

1. Perkembangan media digital berpengaruh besar pada perkembangan pendidikan.
2. Dalam pengajaran bahasa, teknologi digital membuka peluang sekaligus menuntut penerapan cara-cara baru.
3. Ponsel dan gawai digital tidak akan menjadi ancaman terhadap wibawa guru, sekolah, dan orang tua jika sistem sekolah melakukan perombakan dengan melibatkan teknologi digital dalam pembuatan silabus pembelajaran.
4. Guru saat ini merupakan fasilitator yang dituntut bersifat terbuka, adaptif, dan akomodatif.
5. Anak-anak yang lahir di abad ke-21 merupakan *digital native* sehingga secara psikologis mereka berbeda dalam hal kebutuhan, kognitif, kebiasaan, adat-istiadat, serta budaya dan nilai.



## 5. Literasi Sastra di Usia Prapubertas untuk Membentuk Insan Indonesia yang Berkarakter Melalui Pendekatan Psikologi Bahasa

### LITERASI SASTRA DI USIA PRAPUBERTAS UNTUK MEMBENTUK INSAN INDONESIA YANG BERKARAKTER MELALUI PENDEKATAN PSIKOLOGI BAHASA

**Gusdi Sastra**

Universitas Andalas

sastrabudaya84@gmail.com

#### **Abstrak**

Literasi merupakan kemampuan individu menggunakan segenap potensi keterampilan yang dimilikinya, mencakup kemampuan membaca “kata” dan membaca “dunia”, lalu menuliskannya sehingga keterampilan kognitifnya menjadi terasah. Apabila dilakukan pada usia prapubertas (6--12/13 tahun) dan menjadi kebijakan suatu bangsa, ini akan bersifat “*multiple effect*” terhadap kemajuan suatu bangsa yang berkarakter. Untuk mencapai hal itu diperlukan berbagai pendekatan dalam pembelajaran, salah satunya adalah melalui pendekatan psikologi bahasa dengan menggunakan karya sastra sebagai alat dalam mengasah kecerdasan kognitif, baik di otak kiri, apalagi di otak kanan. Makalah ini membahas pentingnya membaca karya sastra di usia prapubertas terutama di sekolah dasar, yang dilihat dari pengaruh literasi terhadap keterampilan fungsi kerja otak seseorang melalui pendekatan psikologi bahasa. Beberapa model pembelajaran yang menerapkan literasi sastra di negara maju, seperti Jepang disinggung dalam makalah ini sebagai pembandingan bahwa hal tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan suatu bangsa. Ditilik dari disiplin neurologi dan psikologi bahasa, pembentukan karakter sangat mungkin dibentuk pada usia prapubertas dan pada usia remaja hingga dewasa akan meneruskan apa yang sudah tertanam di otak dan akan menjadi kebiasaan dalam berperilaku. Pendekatan psikologi bahasa yang digunakan adalah kompetensi, produksi, dan bioneurologi. Ketiganya melibatkan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif pemelajar melalui literasi baca, tulis, simak, dan ceritakan teks karya sastra usia prapubertas. Dari kompetensi dasar ini diharapkan pemelajar akan memiliki kompetensi inti berupa *hard skills* dan *soft skills* yang terlihat dari sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Konsep “**liderlis**” (lihat, dengar, lalu tulis), “**piralis**” (pikir, rasa, lalu tulis), dan “**menudas**” (membaca, menulis → cerdas) sebagai strategi yang diusulkan kepada pemerintah akan melahirkan insan Indonesia berkarakter yang mampu menerjemahkan teks dan pengalaman menjadi nilai-nilai dalam pembentukan karakter. Untuk itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, guru, dan orang tua dalam menciptakan insan terdidik, berdaya saing, dan berkarakter di Indonesia melalui literasi sastra usia prapubertas.

**Kata-kata kunci:** literasi, prapubertas, liderlis, piralis, menudas

#### **Abstract**

*Literacy is an individual ability to use all of the potential skills, including ability of reading “word” and “world” as well as write it until the cognitive skill develops well. If it happened in the prapuberty (6--12/13 years old) and it become the nation*



policy, it would give “multiple effects” to the development of the nation’s character. It has been required by some approaches of learning, one of them is the psychology of language by using literature as the instrument to enrich the cognitive intelligence of left and right hemispheres. This paper discusses the importance of reading literary works during prapuberty especially in elementary school that can be seen as a literacy influence of brain through psychology of language approach. Some learning models applying literature literacy in some developed countries, such as Japan presented in this paper as the comparison to give significant influence of nation’s progress. Even less based on neurology and psychology of language, character buliding can be established during prepuberty period, while in the teenager and adult period, this character will be continued what is already embeded in the brain and become a habit in behaving. Language psychology approaches used in this study are competence, production, and neurobiology. The three approaches involved cognitive domain, psychomotor, and affective learner through reading, writing, listening, and telling the literature work during the prepuberty period. From the basic competence the learner will be expected to have main competences, namely hardskills and softskills in attitude, skill, and knowledge. The concept of “*Liderlis*” (see, listen, then write), “*Piralis*” (think, feel, then write) dan “*Menudas*” (reading, writing → intelligent) as the strategy proposed to the government in order to express the Indonesian character—a character which is able to translate text and experience into values of character building. Therefore, a good cooperation between government, teacher, and parent will be required in creating educated person, competitive and having noble characters in Indonesia through literature literacy during the prapuberty period.

**Keywords:** literacy, prepuberty, liderlis, piralis, menudas

## PENDAHULUAN

Literasi menurut *Education Development Center (EDC)* adalah kemampuan individu menggunakan segenap potensi dan keterampilan yang dimilikinya melalui kemampuan membaca. Potensi membaca akan bermuara pada potensi menulis melalui pembiasaan sejak usia prapubertas karena perkembangan kerja otak sangat pesat pada usia ini (*golden age* dan *silver age*). Untuk itu, keterampilan menyimak dan berbicara harus digunakan untuk menyokong kemampuan membaca dan menulis karena literasi merupakan kualitas atau kemampuan melek huruf seseorang yang tidak hanya verbal, tetapi juga visual yang di dalamnya terdapat ide-ide untuk kecerdasan kognitif otak, terutama kecerdasan otak kanan di usia prapubertas.

Salah satu upaya dalam mencerdaskan otak agar berkembang dengan pesat adalah melalui pengenalan literasi karya sastra sejak dini. Imajinasi yang ditangkap dari karya sastra memberikan reaksi positif yang sangat signifikan terhadap kreativitas otak (terutama otak kanan) ketika seseorang sudah mampu membaca dan menulis.

UNESCO menjelaskan bahwa kemampuan literasi merupakan hak setiap orang untuk meningkatkan keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis sehingga mereka mempunyai kualitas hidup yang baik. Artinya, pengembangan kemampuan literasi bangsa ini adalah melalui membaca dan menulis. Keduanya bersifat *multiple effects* yang menjamin kemajuan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang maju tanpa memiliki budaya baca dan kebiasaan menulis yang tinggi. Untuk itu, upaya peningkatan insan Indonesia yang memiliki



literasi yang baik harus dilakukan sejak usia dini ketika anak sudah mulai mengasah keterampilan kognitif melalui membaca dan menulis di bangku pendidikan sekolah dasar, yaitu melalui literasi sastra Indonesia dan sastra lokal yang layak untuk anak usia prapubertas (6–12/13 tahun).

Literasi sastra harus digerakkan secara bersinergi antara penentu kebijakan (pemerintah), sistem pembelajaran, guru, pemelajar, orang tua, dan lingkungan. Semuanya harus bekerja sama sehingga karakter bangsa ini dapat dibentuk sejak usia dini karena usia sangat berpengaruh dalam menanamkan berbagai nilai. Apabila berbagai nilai dan norma positif tertanam sejak usia prapubertas apalagi usia prasekolah/*golden age* (0-5 tahun) dan *silver age* (6-12 tahun), nilai itulah yang akan dipakai dan berkembang kelak dalam berperilaku setelah usia pubertas (pascapubertas) karena pada usia ini fungsi otak terbelah secara sempurna antara otak kiri dan otak kanan dengan pembagian tugas masing-masing. Oleh sebab itu, sangat penting perlakuan terhadap fungsi kerja otak di usia prapubertas ini, terutama melalui peran literasi. Ketika seseorang telah memasuki usia sekolah, berbagai pendekatan dalam pembelajaran untuk kecerdasan kognitifnya dapat diterapkan. Salah satu dari pendekatan yang terkait dengan fungsi kerja otak ini adalah pendekatan psikologi bahasa.

Psikologi bahasa adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk mencerdaskan manusia sehingga dapat mengubah perilakunya. Psikologi bahasa adalah suatu studi tentang bahasa dan minda atau studi tentang proses mental dalam pemakaian bahasa Aitchison (1998). Clark (1995) membagi psikologi bahasa atas tiga hal, yaitu komprehensi, produksi, dan bioneurologis. Jadi, psikologi bahasa adalah proses mental yang dilalui oleh manusia dalam berbahasa dan memaknai bahasa dan kehidupan sehingga tecermin dari perilakunya.

Komprehensi adalah proses mental yang dilalui oleh individu sampai ia mendengar, memahami, dan membaca apa yang ditangkapnya secara reseptif, sedangkan produksi merupakan proses mental pada diri seseorang sampai ia dapat bertutur dan menulis seperti yang diinginkan secara ekspresif. Bioneurologis adalah alat yang membuat manusia bisa berbahasa atau berkomunikasi (otak dan alat-alat wicara).

Apabila ketiga proses mental diperlakukan secara baik mengikut nilai, norma, dan budi pekerti (berkarakter), yakni sejak proses lokalisasi otak sampai lateralisasi otak, karakter yang diharapkan pada seseorang akan terbentuk secara baik. Proses ini berkembang dengan pesat sejak pembentukan sel-sel saraf di otak usia empat bulan dalam rahim sampai usia pubertas lebih kurang usia 12-13 tahun (Geshwind, 2000). Berbagai sikap positif yang dibahasakan oleh seseorang dapat dipahami oleh orang lain. Persoalannya adalah bagaimana ketiga proses ini dapat dilatih atau dibiasakan sehingga menjadi karakter dan keterampilan seseorang. Hal-hal positif yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter pada usia ini, di antaranya, adalah melalui kebiasaan membaca (membaca alam dan buku) untuk mengaktifkan miliaran sel saraf di otak dan menulis untuk menyampaikan pikiran, selain berbahasa secara lisan atau bertutur.

Proses mental harus didukung oleh kompetensi kognitif yang dilengkapi dengan psikomotorik dan afektif. Dengan itu akan lahir manusia yang berkarakter, sehat fisik dan mental dalam menjalankan perannya di lingkungan terdekat dan dalam sistem sosialnya. Ketiga kompetensi ini sangat berpengaruh apabila dimulai sejak usia prapubertas. Tidak saja pada usia *golden age* (usia prapubertas), pada



usia ini proses pembelajaran awal dan pembiasaan terjadi sehingga area *corpus collosum* dan *system limbic* di otak anak akan terbentuk secara positif yang akan menjadi karakter dasar anak. Geschwind (2000) mengatakan bahwa metode yang efektif dari pembelajaran dan pembiasaan terhadap kecerdasan hemisfer otak adalah melalui empat keterampilan, yaitu *reading + writing and listening + speaking*, sedangkan pembentukan karakter anak dituntun oleh kecerdasan emosional anak. Artinya, karakter seseorang sangat ditentukan oleh perlakuan terhadap area hemisfer kanan otaknya, terutama pada usia prasekolah dan pendidikan dasar.

Kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan dan cara penyampaianya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan banyak faktor, seperti guru, fasilitas, bahasa pertama, dan kurikulum. Kurikulum berbahasa adalah kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Wachidah, 2003). Pelbagai faktor tersebut sangat menentukan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pelajar. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan terlebih dahulu kompetensi pelbagai faktor tersebut sehingga dapat menunjang kompetensi pelajar sebagai sasaran. Artinya, apabila menghendaki kemampuan membaca dan menulis seorang pembelajar meningkat, kompetensi pelbagai faktor pendukungnya sangat perlu ditingkatkan. Di antara kompetensi yang perlu ditingkatkan tersebut adalah proses atau sistem pembelajaran dan perilaku pemelajar terhadap budaya dan bahasanya sehingga akan menjadi insan terdidik yang berkarakter.

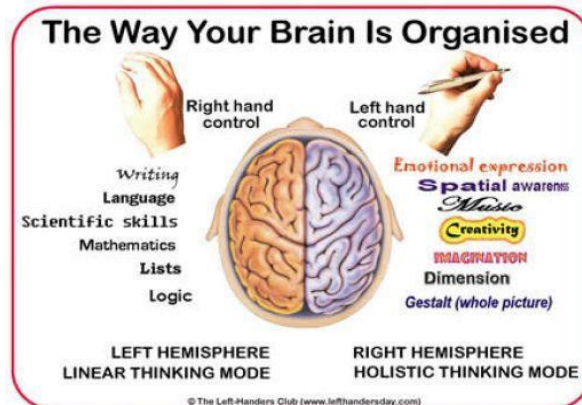
## LANDASAN TEORI

### 1. Hemisfer Otak, Usia Prapubertas, dan Karakter

Sistem pendidikan yang berlaku merupakan faktor penentu dalam pembentukan karakter seseorang. Perilaku seseorang merupakan cerminan dari cara berpikir yang terbentuk melalui proses yang cukup panjang dalam kehidupan seseorang, terutama perlakuan terhadap perkembangan otak, sejak dalam rahim ibu sampai usia pubertas, sepanjang terjadinya proses lateralisasi dan lokalisasi otak antara hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Jika ditinjau dari aspek psiko-neurolinguistik, pembentukan kepribadian seseorang sudah terjadi sejak anak dalam kandungan, yaitu sejak terbentuknya lapisan tunggal sel *neural plate* di bagian tengah belakang embrio otak pada bulan keempat perkembangan *fetal* (Geschwind, 2000). Hal itu berkembang terus secara pesat pada usia 0–5 tahun sampai usia pubertas (lebih kurang 11–13 tahun) pada area hemisfer otak kanan yang diikuti oleh perkembangan hemisfer otak kiri. Sensor *input* yang diproses di area motorik kortikal belahan kanan otak akan mengantarkan pesan *somatosensorik* ke daerah *wernicke* dan daerah *broca* di area hemisfer otak kiri menjadi sistem kompetensi linguistiknya.

Apabila perkembangan terjadi secara positif pada masa ini, yakni reaksi sensorik dan motorik mengalir dari otak belahan kanan dan diteruskan di otak belahan kiri secara bertahap, diperoleh perkembangan otak secara positif dengan kreativitas kecerdasan otak kanan. Oleh sebab itu, usia 0 tahun sampai lebih kurang 12 tahun masa pubertas anak adalah masa penentuan kreativitas kecerdasan pikiran dan keterampilan bersikap. Kemudian, proses *lateralisasi* otak berlangsung terus sampai usia dewasa (sekitar umur 25 tahun). Proses *lateralisasi* adalah aktifnya sel-sel *asimetris* di kedua hemisfer secara bertingkat atau hierarki kortikal kanan dan

kiri dalam jumlah yang tidak terbatas. Pergerakan sel-sel akan dapat berkoordinasi secara keseluruhan bergantung pada perintah yang dimiliki oleh kecerdasan hemisfer sebelum masa pubertas (Obler, 1999). Oleh sebab itu, terampil berperilaku positif sangat berkaitan dengan perlakuan terhadap daerah otak sebelum masa pubertas karena persoalan kepribadian bukan tugas hemisfer kiri yang mengatur perkembangan intelektual seseorang, melainkan bagaimana perlakuan terhadap hemisfer kanannya dalam mencapai kematangan emosional dalam mengekspresikan dirinya.



Sumber : Hemisphere brain/6/5/2014 dalam Sastra (2016)

Perkembangan otak kanan sangat ditentukan oleh perlakuan terhadapnya sehingga otak berkembang dengan baik sesuai dengan fungsinya. Karena kreativitas dan emosi berada pada hemisfer kanan, perkembangan sel-sel saraf di bagian ini menjadi sangat penting untuk kecerdasan emosionalnya. Bagian inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, individu yang satu dan individu lainnya. Bagian ini jugalah yang berperan dalam penggunaan kompetensi yang sudah dimiliki oleh otak kiri. Apalagi dilihat dari perkembangan sel-sel di otak, bagian kanan berkembang sangat pesat pada umur *golden age*. Kecepatan perkembangan itu terjadi secara internal dan eksternal. Apabila perlakuan terhadapnya diperoleh otak secara positif, anak akan berkembang dengan baik, sedangkan belahan otak kiri secara bertahap akan berkembang sesuai dengan umur anak tanpa harus dipaksakan. Tuntutan kehidupan membuat sel-sel saraf hemisfer kiri berkembang dengan sendirinya tanpa harus dipicu terlalu dini sebab akan mengganggu perkembangan daerah hemisfer kanan.

*Corpus collosum* yang menghubungkan miliaran sel saraf antara kedua bagian akan membentuk karakter. Bagian yang menjadi kepribadian anak itulah yang akan berkembang positif atau tidak sesuai dengan nilai atau norma yang baik, yang diterima dan disenangi semua pihak. Kontrol perkembangan daerah ini berlangsung pesat sampai usia pubertas (lebih kurang sampai usia 11--13 tahun). Dengan demikian, perubahan karakter seseorang sangat ditentukan oleh perlakuan terhadap perkembangan otak pada usia prapubertas, yaitu perlakuan yang baik terhadap daerah sistem limbik bagian dalam di otak bagian tengah tersebut. Sistem limbik ini sangat berpengaruh terhadap perilaku atau *attitude* seseorang (Bloom dkk., 1996). Dulewicz dan Higg (2001) mengatakan bahwa pengaktifan daerah hemisfer kanan dapat meningkatkan kecerdasan emosional anak. Kecerdasan



emosional ini bukanlah bawaan genetik, melainkan sesuatu yang dapat dilatih dan dikembangkan melalui pendidikan karakter.

Pendidikan karakter harus dilakukan sejak usia dini, bahkan sejak bayi dalam kandungan, usia prasekolah (0--5 tahun), dan usia pendidikan dasar (6--11/12 tahun). Sampai usia pubertas adalah masa-masa aktif sel-sel saraf. Perkembangan otak berlangsung pesat karena pada usia pubertas proses lokalisasi otak sudah terbentuk dengan sempurna sehingga penanaman nilai-nilai karakter menjadi efektif (Geshwind, 2000). Ahli psikologi menyebut usia ini sebagai usia emas (*golden age*) karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 5 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 6--12 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari sini, sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, prasekolah, dan pendidikan dasar yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Sistem pendidikan yang disusun dan peranan guru di sekolah diharapkan dapat membentuk karakter anak sehingga kompetensi yang diharapkan, yaitu beberapa nilai-nilai pendidikan karakter, dapat tercapai.

Balitbang Kemendiknas pada 2013 telah menetapkan 18 nilai-nilai dasar pendidikan karakter. Nilai-nilai tersebut adalah religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, **gemar membaca**, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Kesemua itu merupakan nilai-nilai moral yang diharapkan menjadi perilaku siswa yang berkarakter. Selain itu, Kurikulum 2013 dengan konsep berbasis kompetensi dengan metode pembelajaran *SCL (student centre learning)* sudah harus diberlakukan sejak usia di sekolah dasar karena di usia ini penanaman nilai-nilai tersebut sangat mempercepat proses kecerdasan dan perkembangan emosional otak belahan kanan. Apabila otak kanan berkembang dengan baik, otak kiri akan ikut sesuai dengan pertumbuhan usia.

Pendidikan karakter tingkat dasar haruslah membentuk suatu fondasi yang kuat demi keutuhan rangkaian pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin luas pula ragam ilmu yang didapat seseorang dan akibat negatif yang akan didapatkannya pun semakin besar jika tanpa landasan pengertian pendidikan karakter yang diterapkan sejak usia dini.

## 2. Model Literasi Kemanusiaan di Sekolah Dasar Jepang

Beberapa kebijakan yang membentuk karakter bangsa Jepang, di antaranya, dapat dilihat dari perlakuan terhadap siswa dan metode pembelajaran di tingkat sekolah dasar (*Shougakko / 小学校*) yang tecermin dari beberapa aktivitas siswa di sekolah yang berlangsung selama enam tahun.

Mata pelajaran yang ada di sekolah dasar Jepang berdasarkan kurikulum dari kementerian pendidikannya (*Monbusho*), antara lain, adalah bahasa Jepang (*kokugo*), aritmatika (*sansuu*), IPA atau *science (rika)*, kebiasaan hidup (*seikatsu*), musik (*ongaku*), menggambar dan kerajinan (*zuga kousaku*), perekonomian keluarga (*katei*), pendidikan fisik (*taiiku*), pendidikan moral (*doutoku*), studi lingkungan hidup, aktivitas khusus, dan studi terapan. Mata pelajaran dalam setiap





hari kurang lebih hanya empat dan diberikan secara bergantian mulai pukul 08.30 sampai 16.00, dikurangi jam istirahat siang sambil makan bersama.

Mata pelajaran tersebut tidak diajarkan keseluruhan mulai dari kelas 1, tetapi bertahap kualitas dan kuantitasnya, mulai dari kelas 1 sampai ke kelas berikutnya. Misalnya, di kelas 1 jumlah jam pelajaran bahasa Jepang lebih banyak, yang di dalamnya menyangkut keterampilan bahasa Jepang, seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara, atau dalam pelajaran aritmatika anak di kelas 1 hanya diperkenalkan angka dan bagaimana menggunakan angka, bukan bagaimana menghitung angka. Pelajaran IPA dapat disatukan dengan studi lingkungan hidup, misalnya, sehingga anak mengenal lingkungan secara langsung sesuai dengan kurikulum yang ada.

Begitu juga dengan mata pelajaran lainnya, hampir semua terkait dengan pengalaman anak dalam kehidupan sehari-hari, tanpa harus dikejar oleh ujian-ujian dan target nilai. Setiap anak akan belajar dengan riang hati hampir pada setiap mata pelajaran secara berkelompok. Yang menilai kompetensi materi setiap pelajaran mereka adalah anggota kelompok mereka sendiri. Guru hanya membimbing, mengarahkan, dan memotivasi agar anak bersemangat dalam ikhtiar menguasai setiap topik pelajaran dengan mengikuti kurikulum yang telah ada. Setiap anak tidak ada yang tertinggal dalam mengenal dan memahami setiap materi. Tidak ada anak yang tinggal kelas. Apabila ditemukan oleh guru anak yang lemah penguasaannya dalam satu materi pelajaran, dia akan diberi pelajaran tambahan setelah anak yang lainnya pulang sekolah pada sore harinya.

Anak tidak dinilai berdasarkan perolehan angka dari hasil ujian, tetapi berdasarkan kompetensi dalam menguasai setiap mata pelajaran. Jadi, rapor atau hasil belajar anak bukanlah berdasarkan angka-angka, melainkan berisi teks keterangan tentang kemampuan anak serta pesan tentang apa yang harus ditingkatkan lagi oleh anak. Setiap anak punya potensi yang berbeda-beda bergantung pada minat anak. Jadi, tidak ada ukuran untuk menilai anak pintar dan anak bodoh, yang ada hanya kompetensi yang berbeda pada setiap anak dalam menguasai berbagai bidang pelajaran, sedangkan pencapaian kompetensi pada pelajaran moral dan keterampilan diharapkan sama pada setiap anak.

Pendekatan dan metode pembelajaran di sekolah Jepang lebih banyak belajar dari pengalaman dan pengamatan langsung sehingga anak-anak mengerti dan paham. Mereka tidak hanya mengandalkan teori dan hafalan. Anak-anak diajak memahami setiap materi dengan pengalaman mereka di lapangan. Di setiap sekolah anak-anak belajar sambil mengamati dan melakukan percobaan langsung dari berbagai teori yang dipelajari dalam setiap materi pelajaran, misalnya, bagaimana menanam dan memelihara tumbuhan, melihat dan mengamati hewan, membeli dan menjual, dan berbagai kegiatan lain yang terkait dengan tiap materi yang sedang dipelajarinya.

Pembelajaran *life skill* di sekolah dasar di Jepang sangat menonjol, yaitu melalui mata pelajaran *seikatsu* (kebiasaan hidup). Mata pelajaran ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak menjalani hidup mandiri sehari-hari. Daripada mulai mengajarkan IPA atau IPS, Jepang lebih memilih memperkenalkan tata cara kehidupan sehari-hari kepada anak-anak yang baru menyelesaikan prasekolah. Siswa baru lebih difokuskan pada kegiatan bermain daripada belajar di dalam kelas. Oleh sebab itu, anak kelas 1 sampai kelas 2 SD di Jepang masih dalam proses transisi melalui banyak kegiatan belajar sambil bermain, bahkan hampir di setiap



sekolah disediakan arena bermain, seperti yang ada di tempat penitipan anak dan di taman kanak-kanak. Ukuran tinggi meja dan kursi yang dipakai anak pada kelas 1 sampai kelas tinggi berikutnya juga tidak sama karena disesuaikan dengan tinggi anak-anak.

Pembelajaran bahasa Jepang (*kokugo*) dan berhitung (*sansuu*) diajarkan lebih banyak dibandingkan dengan pelajaran lainnya. Pendidikan olahraga juga menjadi mata pelajaran yang diajarkan dalam jumlah yang melebihi mata pelajaran lainnya, selain bahasa dan berhitung. Selain pendidikan akademik, pendidikan estetika berupa musik dan menggambar juga diajarkan dalam porsi besar. Semua mata pelajaran bertujuan mengembangkan kecerdasan, terutama kecerdasan otak kanan anak. Pengembangan kreativitas anak selalu dilatih melalui pengembangan keterampilan berbahasa, yaitu membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Keempat keterampilan ini selalu dipraktikkan setiap hari melalui tugas-tugas menulis (*sakubun*/baca: *sakubung*/tidak sama dengan “mengarang”).

Melalui pelajaran bahasa Jepang (*kokugo*), anak diperkenalkan pada teks karya sastra Jepang yang berisi nilai-nilai kemanusiaan. Bacaan yang wajib dibacakan kepada anak dan yang wajib dibaca anak sudah ditetapkan oleh kementerian. Buku bernilai sastra Jepang ataupun terjemahan sudah dimiliki oleh setiap sekolah dan menjadi kurikulum wajib dalam pembelajaran bahasa. Dengan belajar bahasa Jepang, anak sekaligus mendapatkan pengetahuan dan pencerdasan otaknya dengan memahami teks sastra, yang jenis dan jumlahnya berbeda untuk setiap tingkatan kelas. Bahkan, sejak usai prasekolah pun buku-buku sastra Jepang sudah dibacakan oleh guru di taman kanak-kanak kepada anak di sekolah dan penitipan anak di Jepang.

Mata pelajaran *sakubun* (menulis) diberikan sudah sejak kelas satu sekolah dasar, yang kemudian juga sampai ke sekolah menengah atas dengan persentase rendah sampai tinggi setiap hari. Siswa diwajibkan menulis apa yang dibaca dari pengalaman setiap hari tentang empat hal, yaitu *mirukoto* (apa yang dilihat), *kikukoto* (apa yang didengar), *kanggaekoto* (apa yang dipikirkan), dan *kokorokoto* (apa yang dirasakan) berkenaan dengan tiap aktivitas keseharian yang dialami oleh siswa. Jadi, siswa wajib menulis, baik apa yang telah dibaca maupun apa yang dialami dan dirasakannya secara langsung. Sejalan dengan itu, anak sekaligus terlatih menyampaikan tugas *sakubun*-nya di depan guru dan teman-temannya.

Selain itu, karena pendidikan dasar (SD) memegang peranan yang signifikan pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, di Jepang sejak dini sudah ditanamkan pendidikan karakter dan pendidikan nilai-nilai moral. Sebagai contoh, dalam penyampaian mata pelajaran moral, tentang berbohong, pendekatan yang dilakukan oleh guru Jepang adalah tidak dengan mendoktrin tentang pentingnya berlaku jujur, tetapi dengan mengajak anak-anak berdiskusi tentang akibat-akibat berbohong. Tidak ada yang malu bertanya dan menertawakan teman yang sedang bertanya, bahkan dalam menjawab pertanyaan guru pun, semuanya beradu cepat serentak mengacungkan tangan seraya meneriakkan “*haik*” dengan lantang. Diskusi interaktif itu menggiring siswa berpikir tentang pentingnya melaksanakan nilai-nilai moral yang akan diajarkan. Tidak ada proses menghafal, juga tidak ada tes tertulis untuk pelajaran moral ini. Untuk mengecek pemahaman siswa tentang pelajaran moral yang diajarkan, mereka diminta menuliskan apa yang mereka pikirkan tentang tema moral tertentu.



Kadang mereka juga diputar film bermuatan moral yang akan diajarkan, kemudian mendiskusikan makna dari film tersebut (Hartuti, 2013).

Begitu juga dengan mata pelajaran *seikatsu* atau kebiasaan hidup yang merupakan faktor penentu kesuksesan *life skill* anak dalam kehidupannya kelak. Pelajaran ini meliputi disiplin, cara makan, menyiapkan makanan, kebersihan, keteraturan, dan kerapian. Ada pula kompetensi yang harus dicapai anak berdasarkan tingkat kelas, yaitu bisa berenang pada kelas 1, bisa bersepeda pada kelas 2, bisa bersepeda roda satu pada kelas 3, bisa menyiapkan peralatan mancakrida (*outbond*) dan bermalam pada kelas 4, berkebun, berdagang, beternak, dsb. Semuanya menanamkan nilai-nilai karakter dan sikap mandiri dan bertanggung jawab pada anak usia pendidikan dasar.

Perlakuan terhadap fungsi kerja otak belahan kanan telah dibuktikan oleh bangsa Jepang melalui sistem pendidikannya, yaitu dengan melakukan beberapa kreativitas imajiner dan mengasah keterampilan berbahasa melalui membaca, menulis, menyimak, dan berbicara dari usia 6 sampai 17 tahun. Pada tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, keterampilan bahasa ini dilatih melalui mata pelajaran bahasa negara (*kokugo*) dan mata pelajaran menulis (*sakubun*). Di sekolah dasar, pelajaran *kokugo* diberikan sekitar 6 jam dalam seminggu dengan materi pengenalan huruf kanji, hiragana, dan katakana lalu menuliskannya, kemudian diiringi dengan membaca novel ringan anak-anak (*syuuzi*) dan cerita-cerita rakyat. Di sekolah menengah pertama dan di sekolah menengah atas pelajaran *kokugo* materinya membaca novel-novel lama dan karya-karya sastra Jepang dan Cina. Mata pelajaran *sakubung* (menulis) diberikan mulai kelas satu sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dengan persentase jam terendah sampai tinggi setiap hari.

## PEMBAHASAN

### 1. Literasi Sastra Melalui Psikologi Bahasa untuk Insan Indonesia Berkarakter

Pendekatan psikologi bahasa dapat diterapkan untuk membentuk karakter siswa, terutama dalam pembentukan nilai gemar membaca, komunikatif, dan berbagai nilai yang terkandung pada teks yang dibaca dan yang ditulis. Terintegrasinya kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam berbagai bidang studi tentu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Maka dari itu, metode pembelajaran bahasa Indonesia menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, kompetensi pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan dapat mengasah keterampilan berbahasa siswa sehingga lahir siswa yang berkarakter melalui empat kompetensi keterampilan dasar, yaitu membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Melalui kompetensi ini siswa diharapkan akan memiliki kompetensi inti berupa *hard skills* dan *soft skills* yang terlihat dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa yang saling terkait pada setiap mata pelajaran.

Pendekatan psikologi bahasa merupakan usaha untuk mencerdaskan minda manusia. Di dalam konteks ini terlibat tiga komponen pendukung, yaitu mencerdaskan pemerintah melalui sistemnya, mencerdaskan masyarakat melalui pembiasaan, dan mencerdaskan guru dan murid melalui aturan-aturan yang dibangun bersama. Bahasa merupakan jembatan untuk sampai kepada wilayah kecerdasan tersebut (Clark, 1995). Oleh sebab itu, pendekatan psikologi bahasa merupakan sikap untuk mengolah dan melatih diri melalui tiga proses literasi mental, yaitu literasi komprehensi, literasi produksi, dan literasi bioneurologis.



### a. Literasi Komprehensi

Literasi komprehensi adalah proses mental yang dilalui oleh manusia hingga dapat menangkap apa yang disampaikan orang secara lisan dan tulisan serta memahami apa yang dimaksudkannya. Pada tahap ini seorang manusia memerlukan kompetensi mendengar dan membaca. Kemampuan mendengar sudah diperoleh seseorang pada masa bayi, sedangkan kemampuan membaca rata-rata sudah dipunyai semenjak umur enam tahun (usia sekolah) dan secara perlahan akan meningkat kemampuannya sampai membaca lancar kurang lebih pada umur delapan tahun. Pemahaman terhadap apa yang didengar dan apa yang dibaca akan diolah oleh otak seorang anak. Setiap anak berbeda-beda tingkat pemahamannya.

Faktor yang memengaruhi kecerdasan otak seseorang, tidak hanya ditentukan oleh keturunan, tetapi juga sangat ditentukan juga oleh makanan, gerakan, dan pengayaan lingkungan (Rakhmat, 2005). Keempat hal itu harus dibangun bersama oleh orang tua, sekolah, dan pemerintah. Tahap literasi komprehensi merupakan dasar dalam membentuk tingkat kecerdasan seseorang. Dengan demikian, masa prasekolah dan sekolah dasar, sangat menentukan. Pemahaman yang dimaksud tidak saja terhadap apa yang dapat dilihat melalui bacaan, tetapi juga dari alam. Membaca alam artinya memahami dan menerjemahkan makna alam seperti yang terlihat oleh pancaindra. Pada tahap ini, seorang individu berusaha memaknai apa yang dilihat dari alam dan dari bacaan serta menerjemahkan apa yang didengar oleh indra pendengaran.

Pada proses mental seorang anak yang normal, saat melihat atau membaca dengan menggunakan indra pelihatan di lobus oksipital, lobus temporal yang berkaitan dengan pendengaran dan bahasa akan bekerja aktif. Apabila indra pelihatan dan pendengaran bekerja secara aktif sekaligus, neuron pada otak akan semakin aktif sehingga terjadilah proses pembelajaran, yaitu aktifnya impuls elektrik yang mengalir ke akson atau cabang dari neuron. Berdasarkan proses komprehensi pada otak seorang manusia dalam tahap pembelajaran, konsep “tuliskan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar” menjadi sangat efektif. Penulis menggunakan istilah “**liderlis**” → lihat, dengar, lalu tulis (*mitakoto* dan *kikukoto*) yang mewakili aspek komprehensif.

Konsep **liderlis** menjelaskan bahwa sesuatu dibiasakan dan dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan yang didukung oleh sistem yang terjaga akan menjadi budaya. Budaya baca dan tulis sebenarnya dapat dibina melalui konsep **liderlis** dan “**piralis**” → pikir, rasa, lalu tulis (*kangaekoto* dan *kokorokoto*) yang dimulai semenjak anak belajar di sekolah dasar, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam proses belajar siswa sejak pendidikan dasar, yaitu dengan menuliskan empat hal setiap hari sebagai tugas mengarang (*sakubun*), yakni menuliskan apa yang mereka pikir (*kangaekoto*), apa yang mereka rasa (*kokorokoto*), apa yang mereka dengar (*kikukoto*), dan apa yang mereka lihat (*mitakoto*) dalam kehidupan setiap hari.

Konsep **liderlis** ini diterapkan mulai dari sekolah dasar melalui apa yang dilihat dan didengar anak, sejak berangkat ke sekolah, selama di sekolah, dan sepulang sekolah. Kemudian, di tingkatan kelas yang anak-anaknya telah mampu membaca karya-karya sastra, seperti cerita anak, dongeng, dan foklor anak, siswa diwajibkan menuliskan dan menceritakan kembali di kelompok belajar anak dalam kelas. Dengan demikian, setiap anak akan terlatih menggunakan kemampuan literasi baca tulisnya di depan orang lain atau teman sekelasnya. Selain itu, nilai-nilai dalam teks



sastra anak akan tertanam dalam diri anak dan menjadi karakter yang mencerminkan budaya lingkungan anak/siswa.

### **b. Literasi Produksi**

Literasi produksi adalah kemampuan seseorang bertutur dan menulis apa yang dipikirkannya. Bahasa yang telah diperoleh seseorang melalui tahap pemerolehan bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua, akan diproduksi secara bertahap sesuai dengan kompetensi perkembangan otaknya. Secara linguistik pengetahuan seseorang akan realita hidup akan dibahasakannya melalui tiga proses fonologi dalam memproduksi kata (Kohn, 1993), yaitu tahap-tahap fonologi, fonemik, dan fonetik.

Dengan demikian, semakin bertambah kosakata seorang anak, semakin bertambah pulalah kemampuannya memproduksi bahasa yang sudah tersimpan dalam memorinya. Kemampuan memproduksi tersebut harus dilatih dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan yang didapat. Kosakata yang tersimpan di otak harus ditumbuhkembangkan dan dipancing selalu sehingga menjadi bagian dari kekayaan bahasa seorang anak melalui pengayaan lingkungan, seperti membaca alam (pengamatan langsung dari setiap mata pelajaran), pengalaman langsung, dan pengetahuan dari buku sehingga anak memiliki literasi produksi yang produktif atau ekspresif. Pengekspresiannya bisa dilakukan melalui bahasa tulis, bisa pula melalui bahasa tidak tertulis, atau melalui pengembangan jumlah kosakata dari hari ke hari.

Salah satu cara memancing dan mengembangkan kosakata adalah dengan menuliskan apa yang terpikir dan apa yang terasa. Seorang anak yang telah mengikuti masa belajar di sekolah dasar akan terpancing memikirkan dan merasakan berbagai hal dalam menjalankan aktivitas di sekolah. Otak si anak akan selalu tersentuh hal-hal baru yang akan menjadi pengetahuannya dari lingkungan dan dari proses belajar. Pada sisi lain, anak juga dapat memproduksi pengalaman melalui apa yang dia rasakan pada saat belajar dan mengamati lingkungannya, seperti perasaan gembira, sedih, dan marah.

Berdasarkan hal tersebut, konsep yang dapat diterapkan untuk mengembangkan dan memancing kosakata untuk memproduksi bahasa, serta bagaimana mengekspresikan perasaan dari pengalaman dan pengamatan terhadap setiap mata pelajaran adalah konsep “**piralis**” → pikir, rasa, lalu tulis (*kanggaekoto dan kokorokoto*). Tradisi menuliskan apa yang dipikir dan apa yang dirasa perlu dibangun sejak usia anak masuk sekolah sehingga siswa menjadi terbiasa memikirkan hal-hal positif pada pengetahuan yang baru diperolehnya. Apabila dibiasakan menuliskan apa yang dirasakan bila bersentuhan dengan dunia baru, siswa terbiasa mengekspresikan perasaan melalui tulisan yang semakin memperlancar kemampuan menulis tentang apa saja yang baru ia pelajari.

Pembiasaan siswa/anak dalam menuliskan apa yang terpikir oleh otak kiri dan apa yang terasa oleh otak kanan adalah proses literasi produksi yang dapat mengembangkan kepribadian anak. Apalagi hal itu diperoleh dari hasil berpikir melalui karya-karya sastra anak, cerita-cerita, dan folklor anak yang wajib dibaca oleh setiap siswa di tingkatan sekolah dasar pada usia prapubertas. Pembiasaan menulis apa yang dipikir dan dirasakan ini merupakan cara yang efektif dalam membentuk karakter anak. Dengan demikian, konsep **piralis** pada usia prapubertas sudah terwujud sejak sekolah dasar. Kemudian, dilanjutkan di sekolah menengah



melalui wajib baca karya sastra sesuai dengan tingkatan umur dan kelas anak sampai memasuki universitas karena pembentukan karakter seseorang tidak dapat terjadi setelah dewasa, tetapi harus dibiasakan sejak usia prapubertas melalui pembiasaan dan sistem pembelajaran di sekolah.

### c. Literasi Bioneurologi

Manusia mampu berbahasa karena adanya landasan bioneurologi. Tanpa landasan ini, proses literasi mental komprehensi dan produksi tidak akan berlangsung. Perkembangan bahasa manusia sangat terkait erat dengan perkembangan biologisnya. Di samping itu, faktor neurologi (sistem saraf pusat) juga sangat penting dalam memecahkan masalah pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa, baik lisan maupun tulisan.

Bahasa merupakan fenomena biologis, khususnya biologi perkembangan, sedangkan munculnya kemampuan menulis/berbahasa, selain faktor genetik juga ditentukan oleh lingkungan tempat manusia tersebut berada. Jika terjadi gangguan pada alat artikulasi bahasa, terganggu pulalah bahasa seseorang. Namun, yang lebih berbahaya lagi adalah apabila terganggu fungsi bahasa pada otak karena akan terjadi gangguan berbahasa.

Proses literasi mental dapat dilangsungkan, antara lain, dengan mengaktifkan area wernicke dan broca di otak. Proses ini dapat dijalankan dengan membaca dan menulis sebagai suatu bentuk upaya pencerdasan otak. Karena membaca dan menulis sudah bisa dilakukan sejak usia sekolah dasar, sejak usia ini pula kegiatan membaca dan menulis pada anak sudah harus dibiasakan sehingga proses mental tidak ditanggapi oleh korteks primer pendengaran, tetapi oleh korteks visual di lobe oksipital (Sastra, 2015). Bila tanggapannya juga visual, informasi itu dikirim ke area parietal untuk diproses visualisasi melalui tulisan. Masukan tidak langsung dikirim ke daerah pemahaman, yaitu daerah oksipital. Jadi, input dipahami oleh area wernicke kemudian dikirim ke area broca bila perlu ditanggapi secara verbal.

Dengan demikian, aktivitas membaca dan menulis merupakan suatu proses pencerdasan mental yang dilakukan terus-menerus sejak usia sekolah dasar agar apa yang ditangkap oleh wernicke dapat diteruskan ke area broca guna keseimbangan di otak. Pada seseorang yang terbiasa membaca dan menulis, keseimbangan kerja neuron pada area bahasa pada otak belahan kiri juga terjadi sebagai suatu bentuk pencerdasan kerja otak. Semakin banyak informasi yang didapat dari bacaan, seseorang akan semakin kreatif dalam menuliskannya sehingga fungsi otak belahan kanan juga bekerja dengan pesat. Dengan demikian, konsep yang dapat dijelaskan berkaitan dengan bioneurologis adalah “**menudas**” (membaca + menulis → cerdas). Cerdas pengetahuan kognitifnya dan cerdas emosionalnya sehingga menjadi siswa yang berkarakter berdasarkan apa yang dibaca dan apa yang dituliskannya.

Karya sastra lokal, foleklor, dan cerita-cerita anak dapat memberikan nilai-nilai dalam pembentukan karakter anak. Oleh sebab itu, sejak usia dini anak sudah harus dilatih atau dibiasakan membaca, mengerti, memahami, dan menuliskan perihal tersebut untuk membentuk karakternya sejak dini.

Pencerdasan otak dapat dilakukan melalui pengaktifan area bahasa sensorik dan motorik. Apa yang dibaca akan dipahami oleh area wernicke, kemudian diproses, diolah, dan diteruskan ke area broca sebagai wilayah motorik bahasa yang memerintahkan neuron memproduksi fonemik dalam bentuk bahasa tulisan. Proses



yang terjadi dalam bahasa tulisan sudah lebih mengkristal jika dibandingkan dengan bahasa lisan karena produksi fonem di area broca memerlukan proses dan waktu yang maksimal dengan berpikir dan menyusunnya menjadi kata. Proses kristalisasi tersebut secara neurologi adalah salah satu bentuk pencerdasan karena telah mengaktifkan sejumlah neuron yang terkait dengan area bahasa di otak (Sastra, 2015). Oleh sebab itu, wajib baca buku, baik buku ilmu pengetahuan maupun buku karya sastra anak, kemudian menuliskan serta mendiskusikannya sudah harus diterapkan sejak sekolah dasar jika ingin melahirkan siswa yang cerdas otak kiri dan otaknya.

Penanaman konsep pembiasaan diri yang dilanjutkan melalui wajib baca buku sastra (literasi sastra) yang ditetapkan oleh pemerintah (Kemendikbud) untuk tingkat sekolah dasar (cerita anak dan fabel), kemudian wajib tulis dari apa yang dibaca, dipikir, dan dirasakan terhadap karya sastra tersebut harus diterapkan sebagai suatu kebijakan. Membahas kembali apa yang dibaca secara berkelompok di kelas adalah upaya meningkatkan kecerdasan kognitif otak kiri dan otak kanan pemelajar. Jika diterapkan pada siswa sekolah dasar pada masa usia prapubertas, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan karakter karena dengan berbagai strategi pembelajaran dan pembacaan terhadap nilai-nilai dalam setiap karya sastra sekaligus memajukan insan terdidik yang akan memiliki daya dan berkarakter. Membaca karya sastra, memahami nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya merupakan ciri peningkatan kemampuan kognitif dan keterampilan suatu bangsa. Hal ini perlu diterapkan sejak dini, terutama di sekolah dasar, kemudian dilanjutkan sampai ke sekolah menengah melalui wajib baca prosa dan novel-novel sastra Indonesia ataupun dunia, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa negara lain, seperti Jerman, Jepang, Amerika, Australia, dan Malaysia.

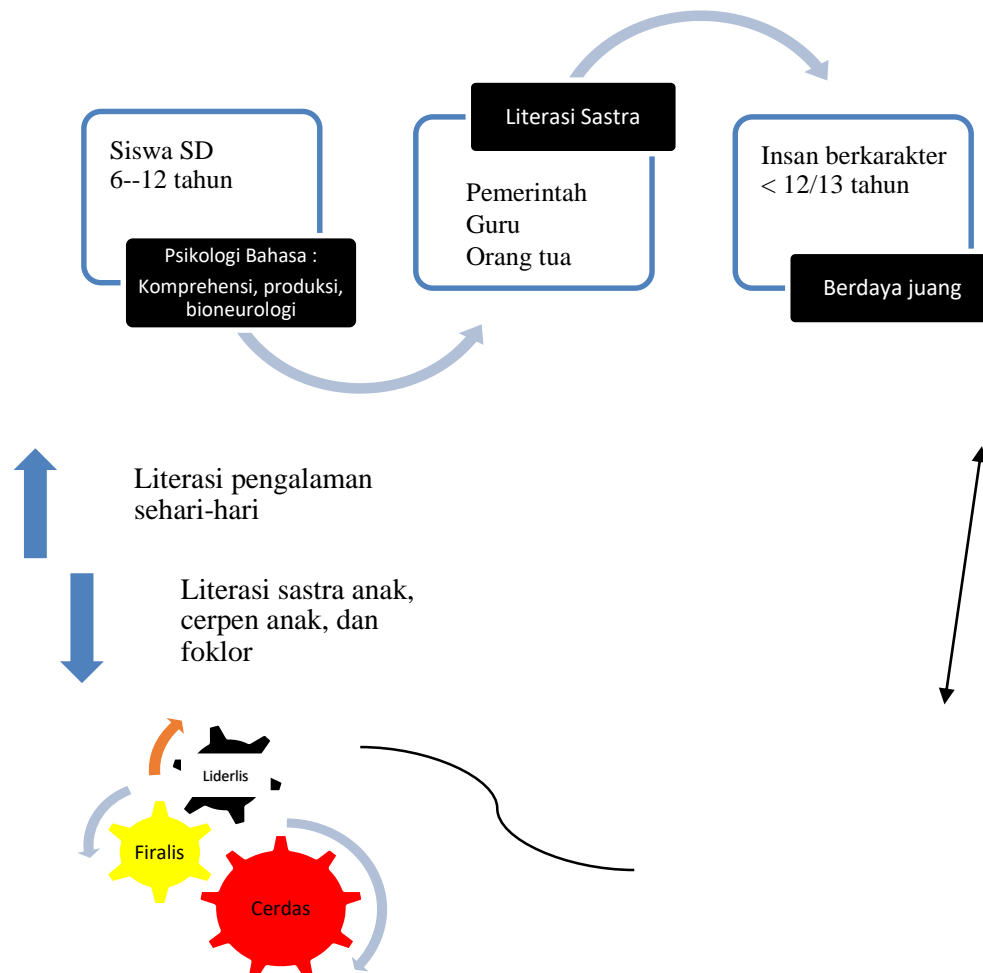
Melalui konsep “**liderlis, piralis, dan menudas**” yang diusulkan ini, diharapkan lahir siswa berkarakter yang mampu menerjemahkan teks menjadi nilai-nilai yang akan membentuk kepribadiannya. Melalui kebiasaan membaca, yaitu menuliskan apa yang dibaca, menyimak apa yang dibaca teman, dan membicarakan atau mendiskusikan apa yang telah sama-sama dibaca akan terjadi proses pencerdasan pikiran dan pencerdasan emosional dari pengetahuan yang diperoleh kemudian menjadi kecerdasan budaya. Pengetahuan tersebut akan menentukan karakter dan sikap serta menjadi *soft skill* dalam keseharian anak.

Persoalan berikutnya adalah melatih kompetensi guru dalam menerapkan metode pembelajaran bahasa melalui konsep **liderlis, piralis, dan menudas** ini. Selain itu, peranan pemerintah sebagai pembuat sistem juga penting karena pendekatan psikologi bahasa tidak saja dalam hal materi pembelajaran bahasa, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung, seperti buku-buku. Buku ilmu pengetahuan untuk kecerdasan otak kiri, sedangkan buku bernilai **sastra** untuk kecerdasan **otak kanan**. Pemilihan buku sangat menentukan kompetensi yang akan dicapai dan karakter siswa yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, guru, dan orang tua dalam mencapai kompetensi dasar siswa, seperti halnya bagaimana sistem pendidikan Jepang yang melibatkan tiga pilar pendidikan tersebut, yaitu pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya bersama-sama dalam menciptakan insan terdidik yang berkarakter.

Konsep **liderlis, piralis, dan menudas** (Sastra, 2018) yang ditawarkan dalam literasi sastra untuk membentuk insan Indonesia yang berkarakter ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar. Selain

itu, konsep itu juga dapat diimplementasikan pada mata pelajaran lainnya karena usia prapubertas sangat berperan dalam membentuk karakter seseorang. Pada usia sekolah menengah konsep itu tinggal melanjutkan saja karena sudah menjadi kebiasaan sejak dari tingkat sekolah dasar.

Konsep dasarnya dapat dilihat melalui skema/gambar berikut ini.



Konsep Literasi Sastra Usia Prapubertas (Sastra, 2018)

## PENUTUP

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari makalah ini, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Psikologi bahasa berkaitan dengan literasi komprehensi, literasi produksi, dan literasi bioneurologis berbahasa.
2. Proses literasi mental harus didukung oleh kompetensi kognitif yang dilengkapi dengan psikomotorik dan afektif. Dengan itu akan lahir manusia yang berkarakter serta sehat fisik dan mental dalam menjalankan perannya di lingkungan terdekat dan dalam sistem sosialnya.
3. Metode yang efektif dari pembelajaran dan pembiasaan terhadap kecerdasan hemisfer otak adalah melalui empat keterampilan, yaitu *reading + writing and listening + speaking*, sedangkan pembentukan karakter anak dituntun oleh





- kecerdasan emosional anak yang dapat dikembangkan melalui literasi sastra anak.
4. Persoalan kepribadian bukan tugas hemisfer kiri yang mengatur perkembangan intelektual seseorang, melainkan bagaimana perlakuan terhadap hemisfer kanannya dalam mencapai kematangan emosional dalam mengekspresikan dirinya.
  5. Pendidikan karakter harus dilakukan sejak usia dini, bahkan sejak bayi dalam kandungan, usia prasekolah (0--5 tahun), sedangkan usia pendidikan dasar (6--11/12 tahun) sampai usia pubertas adalah masa-masa aktif sel-sel saraf perkembangan otak terjadi secara pesat karena pada usia pubertas proses lokalisasi otak sudah terbentuk dengan sempurna.
  6. Pengaktifan daerah hemisfer kanan dapat meningkatkan kecerdasan emosional anak. Kecerdasan emosional ini tidaklah secara genetis dibawa anak sejak lahir, tetapi sesuatu yang dapat dilatih dan dikembangkan melalui pendidikan karakter.
  7. Pendidikan literasi memegang peranan yang signifikan pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang berkarakter sehingga memiliki daya juang.
  8. Kompetensi pembelajaran bahasa (terutama mata pelajaran “menulis” (dulu disebut dengan “mengarang”) diharapkan dapat mengasah keterampilan berbahasa sehingga melahirkan siswa yang berkarakter melalui empat keterampilan, yaitu membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Melalui kompetensi dasar ini diharapkan siswa akan memiliki kompetensi inti berupa *hard skills* dan *soft skills* yang terlihat dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa. Kompetensi ini tidak saja terpakai dalam pembelajaran bahasa, tetapi juga dapat diterapkan pada setiap mata pelajaran melalui metode pembelajar *student center learning*.
  9. Konsep “**liderlis**” (lihat, dengar, lalu tulis), “**piralis**” (pikir, rasa, lalu tulis), dan “**menudas**” (membaca–menulis → cerdas) akan melahirkan siswa yang berkarakter. Untuk itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, guru, dan orang tua dalam menciptakan insan terdidik dan berkarakter yang memiliki daya juang yang tinggi dalam membangun bangsa Indonesia emas. Ketiga konsep literasi sastra usia prapubertas (Sastra, 2018) ini sepatutnya dilanjutkan ke sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi melalui wajib baca karya sastra Indonesia dan daerah bahkan karya sastra dunia, baik berupa cerpen maupun novel dan menjadi tanggung jawab pemerintah, guru, dan masyarakat/orang tua.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aitchison, J. (1994). *Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon*. Oxford: Blackweel Publisher.
- Bloom, R. *et al.* (1996). “Right and Left Hemispheric Contributions to Discourse Coherence and Cohesion”. *International Journal of Neuroscince*, 88: 125-140.
- Clark. (1995). *Psychologyand Language: An Introduction to Psycholinguistics*. New York: HB an Jovanovich, Inc.
- Geschwind, K. (2000). *Clinical Management of Left and Right Hemisphere Dysfunction*. Marylan: Aspen System Corporation.



- Nuh, M. (2013). "Kurikulum 2013". Kemendiknas.
- Obler, K. Oraine and Kris Gjerlow. (1999). *Language and the Brain*. Cambridge University Press.
- Sastra, Gusdi. (2011). *Neurolinguistik: Suatu Pengantar*. Bandung: Alfabeta.
- Sastra, Gusdi. (2014). "Sistem Pendidikan Jepang Tingkat Sekolah Dasar," *Prosiding*. Padang: Sastra Jepang FIB Unand.
- Sastra, Gusdi. (2014). *Bahasa dan Strok*. Padang: Andalas University Press.
- Sastra, Gusdi. (2015). "Peran Hemisfer Otak dalam Membentuk Karakter Siswa," *Prosiding*. Padang: Univ. Bung Hatta.
- Sastra, Gusdi. (2016). *Bioakustik Wicara*. Bandung: Alfabeta.
- 日本の教育制度. (2000). "*Courses of Study, Kindergarten, MECS (Ministry of Education, Culture, Sports, and Science)*".
- Simanjuntak, M. (1990). *Pengantar Psikolinguistik Modern*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Wachidah, S. (2003). "Kurikulum Berbasis Kompetensi, Manfaat dan Penerapannya di Sekolah Menengah di Indonesia". Jakarta: Universitas Negeri Jakarta
- Watson, J. (1984). *Behaviorim*. New York: Norton.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 3 Kelompok 2**

Pembicara : Gusdi Sastra  
Judul Makalah : “Literasi Sastra di Usia Prapubertas untuk Membentuk Insan Indonesia yang Berkarakter Melalui Pendekatan Psikologi Bahasa”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 10.30  
Moderator : Dr. Luh Anik Mayani  
Pencatat : 1. Dewi Khairiah  
2. Nadia Almira Sagitta

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Literasi adalah kemampuan individu menggunakan segenap potensi keterampilan yang dimilikinya, mencakup kemampuan membaca kata dan membaca dunia.
2. Literasi lebih maksimal ketika dikembangkan pada masa prapubertas, yakni masa *golden* dan *silver age* 0--12 tahun.
3. Otak kanan sangat aktif perkembangannya pada masa prapubertas.
4. Kalau otak kiri lebih dahulu dikembangkan, anak akan menjadi tidak kreatif. Fungsi intelektual sulit berkembang karena fungsi kerja otak kiri terlalu dimaksimalkan. Kalau otak kanan sudah berfungsi dengan baik, fungsi otak kiri akan menyusul.
5. Di luar negeri, anak SD tidak diwajibkan menguasai matematika. Anak didorong membaca pada usia yang sangat muda.
6. Anak yang tidak pernah diajarkan mengerjakan pekerjaan rumah tidak dapat otomatis terampil karena ini merupakan kebiasaan. Apalagi kebiasaan bertutur.
7. Di negara maju, perhatian terhadap sekolah dasar sangat besar.
8. Di Indonesia, kita harus memprioritaskan membaca karya sastra sebab ini adalah produk intelektual untuk membentuk karakter.
9. Tidak ada bangsa besar yang mengabaikan kewajiban membaca sastra.
10. Pada zaman penjajahan, siswa di Hindia Belanda diwajibkan membaca 15--25 judul, tetapi kewajiban itu sekarang tidak ada lagi.
11. Siswa Jepang sering diberikan tugas mengarang apa saja yang mereka lihat, pikirkan, dan baca.
12. Usul pengajaran untuk anak SD dari segi psikologi bahasa yang diadopsi dari kebiasaan siswa Jepang adalah:
  - a. komprehensi: *lida-lis* (*lihat, dengar, lalu tulis*). Setelah menulis, kita bahas bersama agar wernicke bekerja dengan maksimal;
  - b. produksi: *pira-lis* (*pikir, rasa lalu tulis*); dan
  - c. bioneurologi: *menudas* (*membaca, menulis, cerdas*).
13. Bagaimana bisa menudas? Dengan mewajibkan pembacaan karya sastra.
14. Sistem pendidikan dibangun oleh tiga pilar, yaitu sekolah, pemerintah, dan masyarakat.



15. Alat pencerdasan ini adalah literasi pengalaman sehari-hari (*lidelris, piralis*) dan karya sastra anak agar lahir insan Indonesia cerdas dan berkarakter.
16. Siswa tidak bisa dituntut bisa menulis jika kebiasaan membaca tidak dilakukan.

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Azwar

Instansi : UPN Veteran Jakarta

#### **Pertanyaan:**

Saya terlibat dalam gerakan literasi sejak kuliah. Persoalannya, prapubertas mereka telanjur penuh masalah, seperti keluarga yang tidak utuh. Bagaimana triknya melihat kasus seperti itu?

#### **Jawaban:**

Bekerja sama dengan psikolog karena perubahan dalam diri anak tidak dapat dilakukan secara otomatis. Ada anak yang dibesarkan oleh orang tua yang berpendidikan tidak bisa menyatu dengan anak nelayan (Padang). Mungkin bisa memisahkan anak yang punya latar belakang orang tua yang berbeda. Tingkatkan rasa ingin tahu anak. Anak dibiarkan membaca apa saja yang dia suka, jangan dibatasi.

#### **Penanya 2**

Nama : Putri

Instansi : Solo

#### **Pertanyaan:**

1. Bagaimana menyikapi dan mendekati anak yang berasal dari luar negeri?
2. Apakah iringan musik klasik bisa memudahkan anak menerima pembelajaran di kelas?

#### **Jawaban:**

1. Anak luar negeri yang masuk ke Indonesia mengalami banyak persoalan. Biarkan anak didampingi oleh orang tuanya di sekolah. Kita bercerita saja sehingga cepat ditangkap oleh otak anak.
2. Umumnya anak luar negeri punya musik. Anak yang senang mendengarkan musik berarti aktivitas otak kanan bekerja dengan baik.

#### **Penanya 3**

Nama : Andis

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar

#### **Pertanyaan:**

Apakah Kementerian sudah menggalakkan kembali jumlah buku yang wajib dibaca anak SD, SMP, dan SMA?



**Jawaban:**

Ide itu pernah disampaikan oleh Taufiq Ismail, tetapi sampai sekarang tidak didengar atau tidak diketahui oleh pejabat pemerintah. Maka dari itu, harus dipaksakan dari atas (pusat). Kebiasaan memang harus dipaksakan terlebih dahulu.

**Isu-Isu Penting:**

1. Kementerian sebaiknya menggalakkan kembali jumlah karya sastra yang wajib dibaca pada jenjang sekolah dasar dan menengah.
2. Anak dibiarkan membaca apa saja yang dia suka dan tidak dibatasi.
3. Pendidik harus memberikan kontribusi terhadap pemerintah agar kurikulum tidak selalu bersifat uji coba, tidak selalu berganti.
4. Usul pengajaran untuk anak SD dari segi psikologi bahasa yang diadopsi dari kebiasaan siswa Jepang.
  - a. komprehensi: *lider-lis* (*lihat, dengar, lalu tulis*). Setelah menulis, kita bahas bersama agar wernicke bekerja dengan maksimal.
  - b. produksi: *pira-lis* (*pikir, rasa lalu tulis*).
  - c. bioneurologi: *menudas* (*membaca, menulis, cerdas*).



## 6. Pemetaan Genre Teks Bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013 (Revisi) Jenjang SMA

### PEMETAAN GENRE TEKS BAHASA INDONESIA PADA KURIKULUM 2013 (REVISI) JENJANG SMA

**Khusnul Fatonah<sup>a</sup> dan Gunawan Wiradharma<sup>b</sup>**

<sup>a</sup>Universitas Esa Unggul

<sup>b</sup> Universitas Negeri Jakarta

khusnulfatonah@gmail.com, g\_wiradharma@yahoo.com

#### Abstrak

Pembelajaran bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 (revisi) adalah pembelajaran berbasis teks. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah teks dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan relevan dengan karakteristik Kurikulum 2013 (revisi) karena mengacu pada tiga ranah pendidikan, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pergantian kurikulum dari Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum 2013 (revisi) berefek pada perubahan beberapa materi yang berkaitan dengan jenis-jenis teks, khususnya pada jenjang SMA. Permasalahan yang muncul adalah adanya perubahan nama jenis teks, penambahan jenis teks, atau penghilangan jenis teks yang terkadang membingungkan guru. Guru memerlukan kerangka acuan dalam bentuk pemetaan genre teks bahasa Indonesia untuk memudahkan pembelajaran di kelas. Penelitian ini bertujuan memetakan jenis-jenis teks yang ada pada Kurikulum 2013 (Revisi) jenjang SMA ke dalam beberapa genre yang masing-masing memiliki tujuan sosial berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa jenis-jenis teks yang termasuk genre cerita dengan subgenre naratif, antara lain, teks anekdot, teks hikayat, teks biografi, teks cerpen, teks drama, teks cerita sejarah, dan teks novel. Sementara itu, puisi termasuk dalam genre cerita dengan subgenre nonnaratif. Jenis-jenis teks yang termasuk genre faktual dengan subgenre laporan, antara lain, teks laporan hasil observasi, karya ilmiah, dan resensi. Sementara itu, jenis teks prosedur termasuk dalam genre faktual dengan subgenre prosedural. Jenis-jenis teks yang termasuk dalam genre tanggapan dengan subgenre transaksional, antara lain, negosiasi dan proposal. Sementara itu, teks eksposisi, teks debat, teks eksplanasi, teks ceramah, surat lamaran pekerjaan, teks editorial, teks artikel, serta teks kritik dan esai termasuk ke dalam subgenre tanggapan dengan subgenre ekspositori. Guru dapat menggunakan pemetaan tersebut dalam proses pembelajaran di kelas dengan melakukan beberapa tahapan, seperti membentuk model dari konteks yang sesuai, membangun kerja sama antarsiswa untuk mengembangkan teks bersama, dan membangun kemandirian siswa untuk mengembangkan teks secara mandiri.

**Kata-kata kunci:** genre teks, Kurikulum 2013 (Revisi), pembelajaran bahasa Indonesia

#### Abstract

*In the 2013 Curriculum (revision), learning bahasa Indonesia is a text-based learning. The reason underlying it is the fact that the text can develop students' thinking skills and it is relevant to the characteristics of the 2013 curriculum (revision) because it refers to three areas of education: knowledge, skills, and*



*attitudes. The change of curriculum from the 2013 Curriculum to the 2013 Curriculum (revision) has an effect on changes of some materials related to the types of texts, especially in the high school level. The problem that arises are changes in the name of the type of text, the addition of the type of text, or the removal of the type of text that sometimes confuses the teacher. The teacher needs a reference frame in the form of mapping Indonesian text genres to facilitate the learning in classroom. This study aims to map the types of text that exist in the 2013 Curriculum (revision) of the high school level into several genres that each has different social goals. The research method used is the reference study. The mapping results show that the types of texts including the story genre with the narrative subgenre include anecdotal texts, saga texts, biographical texts, short story texts, drama texts, and novel texts. Meanwhile, poetry is included in the genre of stories with non-narrative subgenres. The types of texts that belong to the factual genre with the subgenre report include the text of the observation report, scientific work, and reviews. Meanwhile, the type of procedural text include the factual genre with the procedural subgenre. The types of texts included in the genre of responses with the transactional subgenre include negotiations and proposals. Meanwhile, exposition texts, debate texts, explanatory texts, lecture texts, editorial texts, job application letters, articles, critical and essay texts are included in the response subgenre with the expository subgenre. The teacher can use the mapping in the learning process in the classroom by carrying out several stages, such as forming a model from an appropriate context, building collaboration between students to develop a shared text, and building student independence to develop the text independently.*

**Keywords:** *text genre, 2013 Curriculum (revision), Indonesian language learning, bahasa Indonesia*

## **PENDAHULUAN**

Bahasa memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga dapat digunakan sebagai sarana untuk berpikir. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan segala macam pikiran dan perasaannya.

Di Indonesia, selain sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia juga dijadikan mata pelajaran wajib dari jenjang sekolah dasar hingga menengah. Bahkan, di perguruan tinggi bahasa Indonesia dijadikan sebagai mata kuliah umum yang wajib diambil oleh para mahasiswa. Namun, beberapa fakta menunjukkan bahwa peserta didik di Indonesia masih memerlukan bimbingan khusus dalam hal penguasaan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, selain hasil ujian bahasa Indonesia yang masih rendah, penalaran peserta didik terhadap soal-soal bahasa Indonesia juga masih kurang. Hal tersebut didukung oleh beberapa studi yang dilakukan OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) melalui PISA (*Programme for International Student Assessment*), TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*), dan juga PIRLS (*Progress in International Reading Literacy Study*) yang menggambarkan bahwa untuk bidang ilmu Matematika, IPA, dan Bahasa, hanya 5% siswa Indonesia yang mampu menjawab pertanyaan terkait dengan penalaran. Sementara itu, sisanya (95%) berada pada level menengah, yakni hanya bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan hafalan (Mahsun, 2014). Data tersebut menjelaskan bahwa



kemampuan berpikir atau penalaran siswa Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, yakni mampu berpikir sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis.

Kurikulum 2013 hadir sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Berkaca pada kurikulum sebelumnya, yakni Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang sama-sama berbasis kompetensi, Kurikulum 2013 ini lebih berfokus pada pengembangan struktur berpikir siswa melalui pemahaman terhadap teks-teks bahasa Indonesia. Seyogianya, pembelajaran bahasa berbasis teks mampu menyajikan materi yang dapat mengembangkan penalaran siswa menjadi lebih kritis. Meskipun Kurikulum 2006 berupaya menekankan pemakaian bahasa dalam konteks situasi, dominasi rumusan kompetensinya masih didasarkan pada pandangan linguistik struktural. Sementara itu, dalam Kurikulum 2013 kompetensinya didasarkan pada pandangan linguistik fungsional.

Dalam perkembangannya, Kurikulum 2013 itu sendiri sudah mengalami beberapa kali revisi, yakni revisi pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Namun, basis yang digunakan tetap sama, yakni teks. Akan tetapi, berkaitan dengan revisi tersebut, muncul kegelisahan dari para guru atau pendidik ketika mengajarkan beragam teks bahasa Indonesia. Kegelisahan tersebut meliputi adanya perbedaan istilah dalam struktur teks, pergantian nama beberapa jenis teks, serta penghilangan atau penambahan materi jenis-jenis teks.

Sebagai contoh di jenjang sekolah menengah atas (SMA), dalam Kurikulum 2013 teks prosedur kompleks dipelajari di kelas X, tetapi dalam Kurikulum 2013 (Revisi), materi tersebut dihilangkan dari kelas X dan dimasukkan kembali di kelas XI dengan nama teks prosedur. Pada jenjang kelas XI, terdapat penambahan materi, yakni teks ceramah dan proposal. Sementara itu, di kelas XII, materi teks berita dan teks iklan yang sebelumnya ada di Kurikulum 2013 dihilangkan dan diganti dengan materi surat lamaran pekerjaan, artikel, kritik, dan esai.

Adanya perubahan-perubahan tersebut terkadang membingungkan guru dalam mengajarkan materi di kelas. Maka dari itu, guru memerlukan kerangka acuan yang berkaitan dengan jenis-jenis teks untuk membantu arah pembelajaran di kelas sehingga seperti apa pun bentuk kurikulum bahasa Indonesia—selama berbasis teks—guru sudah memiliki pegangan dalam mengajarkan beragam jenis teks tersebut.

Atas dasar itulah pemetaan terhadap berbagai jenis teks bahasa Indonesia yang ada pada Kurikulum 2013 (Revisi), khususnya untuk jenjang SMA menjadi penting. Upaya pemetaan ini dimaksudkan untuk memudahkan guru dalam mengajarkan jenis-jenis teks yang dikelompokkan dalam berbagai genre dan subgenre agar lebih praktis dan mudah dipahami peserta didik.

Satu genre dapat muncul dalam berbagai jenis teks. Bahkan, tidak menutup kemungkinan satu jenis teks dapat dimasukkan ke dalam beberapa genre. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan kemiripan dari segi struktur dan tujuan sosial dari tiap-tiap genre atau subgenre tersebut.

Upaya pemetaan genre teks ini juga disesuaikan dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA/SMK/MA dalam Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa peserta didik perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang berbagai genre teks bahasa Indonesia dan keterampilan membuat berbagai genre teks bahasa Indonesia. Untuk sampai pada tujuan tersebut, guru dapat menjelaskan kepada peserta didik bahwa poin utama dalam memahami konsep



genre teks adalah mengetahui tujuan sosial dari tiap-tiap genre dan kemiripan strukturnya.

Tujuan selanjutnya dari Permendikbud tersebut adalah peserta didik diharapkan mampu membangun komunikasi yang sesuai dengan konteksnya, memiliki pengetahuan yang memadai tentang konsep penggunaan bahasa dan sastra Indonesia dalam beragam genre teks, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan bahasa dan sastra Indonesia secara lisan dan tulis untuk kegiatan berpikir, bertindak, berekspresi, dan berkreasi. Pada tahap selanjutnya peserta didik diharapkan mampu menyampaikan atau mengasah keterampilan berbicara dan rasa percaya dirinya terkait dengan genre teks yang telah dibuatnya.

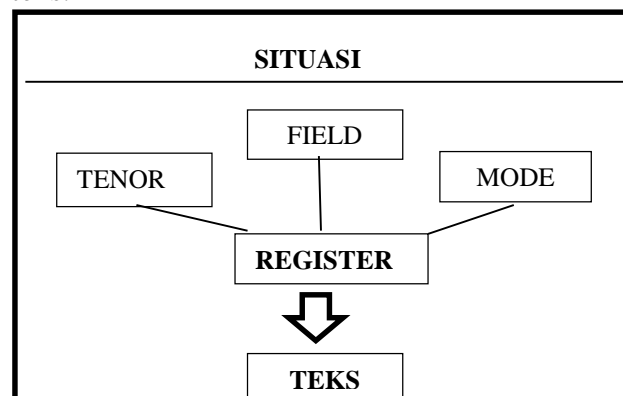
## LANDASAN TEORI

### 1. Hakikat Teks dan Genre

Salah satu cara untuk memahami bahasa adalah melalui teks (Halliday dan Hasan, 1992). Teks merupakan bentuk penggunaan bahasa untuk tujuan tertentu. Dengan kata lain, jika dilihat dari sudut pandang teori semiotika sosial, pembicaraan tentang teks tidak lepas dari tujuan sosial atau konteks tertentu.

Teks dapat diwujudkan dalam bentuk bahasa yang dilisankan, dituliskan, atau dituangkan dalam berbagai bentuk yang dipikirkan selama memiliki konteks situasi. Dalam hal ini, Mahsun (2014) menambahkan bahwa teks juga memiliki struktur berpikir yang lengkap. Karena tujuan atau kegiatan sosial yang hendak dicapai manusia itu berbeda-beda, beragam teks akan muncul dengan struktur teks atau struktur berpikir yang berbeda pula. Semakin banyak teks yang dikuasai seseorang, akan semakin banyak pula struktur berpikir yang dikuasainya. Teks dapat lebih dari sekadar unit semantis yang direalisasikan dalam bentuk kalimat karena fitur esensial sebuah teks adalah adanya interaksi. Berdasarkan konsep-konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks adalah satuan bahasa yang memiliki struktur berpikir lengkap, terikat konteks, dan dapat memunculkan interaksi sosial.

Konteks yang dimaksud dalam teks berkaitan dengan pesan apa yang akan disampaikan (*medan/field*), kepada siapa pesan itu ditujukan (*pelibat/tenor*), dan dalam format bahasa yang bagaimanakah pesan itu disampaikan (*sarana/mode*). Ketiga hal tersebut juga dikenal dengan istilah register. Melalui register inilah dapat ditentukan genre, jenis teks, bahkan struktur sebuah teks. Berikut adalah keterkaitan antara register dan teks.

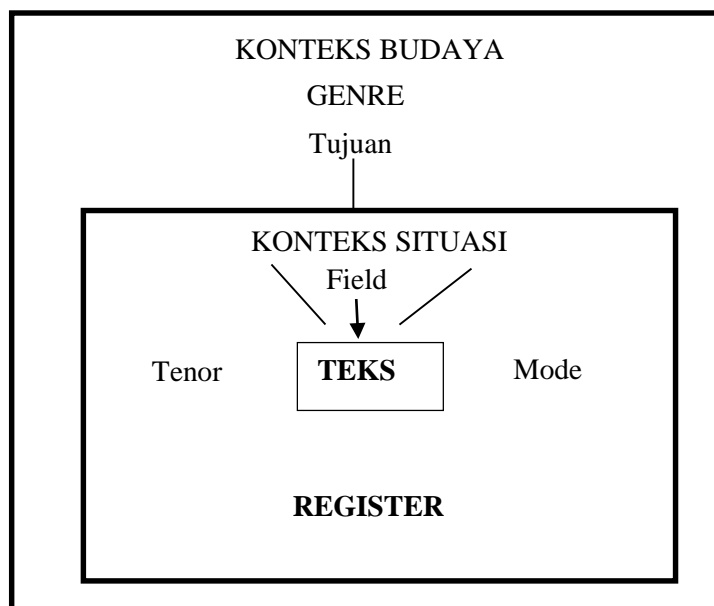


**Bagan 1: Hubungan antara Register dan Teks**

Sumber: Priyatni dan Nurhadi (2017)

Bagan tersebut merepresentasikan wujud teks yang sangat ditentukan oleh register, yakni konteks komunikasi yang meliputi *field*, *tenor*, dan *mode*. Sebagai contoh, isi komunikasi teks prosedur adalah petunjuk untuk melakukan atau menggunakan sesuatu. Jika petunjuk itu ditujukan untuk teman, sapaan yang digunakan adalah sapaan untuk teman. Jika petunjuk itu disajikan dalam kegiatan sehari-hari di rumah, simbol-simbol bahasa yang digunakan adalah bahasa informal, bukan bahasa baku. Konsep ini menjelaskan bahwa register atau konteks situasi juga berperan penting dalam menentukan genre, bentuk atau struktur teks, dan tujuan tertentu sebuah teks.

Selanjutnya, tataran teks yang lebih tinggi adalah genre. Mahsun (2014) mendefinisikan genre sebagai jenis teks yang berfungsi menjadi rujukan agar suatu teks dapat dibuat lebih efektif. Keefektifan yang dimaksud berkaitan dengan ketepatan tujuan sosial, pemilihan dan penyusunan elemen teks, serta penggunaan unsur tata bahasanya. Sementara itu, Priyatni dan Nurhadi (2017) menjelaskan bahwa genre merujuk pada nilai-nilai atau norma-norma kultural yang direalisasikan dalam suatu proses sosial. Proses sosial akan merefleksikan diri menjadi bahasa dalam konteks situasi tertentu. Jika genre dikaitkan dengan tindakan komunikatif dalam konteks budaya, teks dikaitkan pada konteks yang lebih spesifik, yakni konteks situasi. Karena konteks situasi pemakaian bahasa itu sangat beragam, akan beragam pula jenis teksnya. Keterkaitan antara genre dan teks dapat dilihat pada bagan berikut.



**Bagan 2: Model Genre Derewianka**

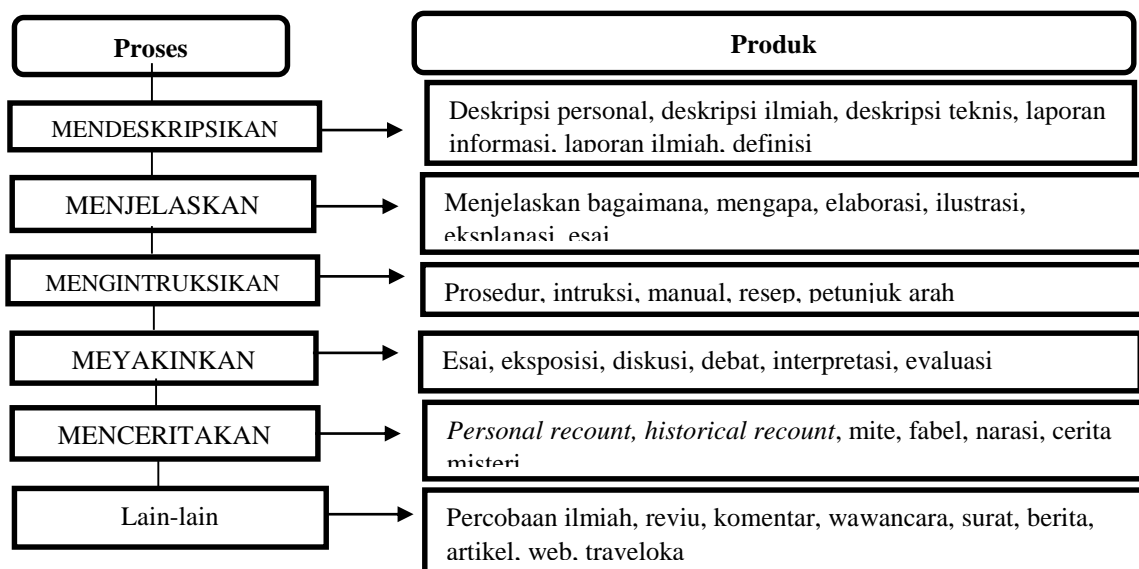
Sumber: Knapp dan Watkins (2005) dalam Priyatni dan Nurhadi, 2017, hlm. 62

Genre ditentukan oleh tujuan komunikasi yang bersifat universal. Inti gagasan tentang genre adalah bahwa genre tidak dilihat secara dominan sebagai produk atau tipe teks, tetapi sebagai suatu perangkat inti proses generik (menggambarkan, menjelaskan, menginstruksikan, berpendapat, dan menceritakan). Untuk satu tujuan yang sama, genre dapat terdiri atas satu atau lebih jenis teks. Sebagai contoh sebuah peristiwa komunikasi, tujuan komunikasinya adalah menginformasikan benda. Untuk menginformasikan benda, langkah yang

ditempuh beragam. Informasi dapat bersifat general, sistematis, dan ilmiah. Namun, dapat juga bersifat spesifik, terperinci, seolah-olah kita dapat merasakan atau melihat benda yang diinformasikan. Cara penginformasian benda yang bersifat general diwujudkan dalam bentuk teks laporan hasil observasi, sedangkan yang spesifik dikategorikan sebagai teks deskripsi.

## 2. Genre Teks Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 (Revisi)

Teori genre memandang bahwa bentuk-bentuk teks (genre) merupakan hasil dari proses dan produk sosial. Sebagai proses sosial, genre memiliki fungsi-fungsi komunikasi untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan petunjuk atau perintah melakukan atau menggunakan sesuatu, meyakinkan, dan menceritakan. Sebagai sebuah produk sosial, tiap-tiap genre digunakan untuk beragam keperluan sesuai dengan konteks situasinya. Relasi antara genre sebagai proses dan produk dapat dilihat pada Bagan 3 berikut.



**Bagan 3**  
**Hubungan Genre Proses dan Produk**

Sumber: Knapp dan Watkins (2005) dalam Priyatni dan Nurhadi, 2017, hlm. 65

Pada konsep yang lain, Mahsun (2014) menjelaskan bahwa berdasarkan sudut pandang penceritaannya, genre atau ragam teks dapat dipilah ke dalam dua kelompok besar, yaitu teks-teks yang termasuk dalam genre sastra dan genre nonsastra. Teks-teks dalam kelompok genre sastra dikategorikan ke dalam genre cerita, sedangkan teks-teks genre nonsastra dikelompokkan ke dalam genre faktual dan genre tanggapan.

Ketiga genre tersebut dikelompokkan kembali menjadi subgenre. Genre cerita terdiri atas subgenre naratif dan nonnaratif. Genre faktual terdiri atas subgenre laporan dan prosedural. Sementara itu, genre tanggapan terdiri atas subgenre transaksional dan ekspositori. Tiap-tiap subgenre tersebut diisi oleh beragam jenis teks yang memiliki kemiripan tujuan sosial atau struktur teksnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.



**Tabel 1: Genre Teks Bahasa Indonesia**

No.	GENRE UTAMA	GENRE	SUBGENRE	TUJUAN SOSIAL
1.	SASTRA	Cerita	Naratif	Menceritakan kejadian
			Nonnaratif	Mendeskripsikan kejadian atau isu
2.	NONSASTRA	Faktual	Laporan	Melaporkan kejadian atau isu atau melaporkan secara umum tentang berbagai kelas benda
			Prosedural	Mengarahkan atau mengajarkan langkah-langkah yang telah ditentukan
		Tanggapan	Transaksional	Menegosiasikan hubungan, informasi, barang, dan layanan
			Ekspositori	Menjelaskan atau menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu

Sumber: Mahsun, 2014

Tabel tersebut menjelaskan bahwa setiap subgenre memiliki tujuan sosial tersendiri yang masing-masing mengejawantahkan diri dalam berbagai jenis teks. Bahkan, dari beragam jenis teks yang ada pada tiap subgenre juga dapat memiliki tujuan sosial yang berbeda-beda. Dari berbagai pengelompokan genre teks tersebut, dalam tulisan ini pemetaan genre teks akan diadaptasi dari pembagian kelompok genre teks menurut Mahsun (2014).

### **3. Jenis-Jenis Teks Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 (Revisi) di SMA**

Dalam kurikulum 2013, bahasa Indonesia diposisikan sebagai penghela ilmu pengetahuan. Hal ini berkaitan dengan pentingnya bahasa Indonesia sebagai sarana untuk menyerap, mengembangkan, dan mengomunikasikan ilmu pengetahuan. Selain itu, bahasa Indonesia juga dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran secara logis.

Konsep pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dapat dilihat dalam rumusan kompetensi dasar substansi bahasa Indonesia dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Meski berorientasi pada teks, pembelajaran bahasa tersebut tetap mempertimbangkan konteks situasi pemakaian bahasa itu sendiri. Adapun jenis-jenis teks yang dipelajari tentu berbeda di tiap jenjang pendidikan. Pembelajaran teks-teks langsung (kontinu) atau teks-teks tunggal atau genre mikro diajarkan pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Sementara itu, jenis-jenis teks tidak langsung (diskontinu) atau teks-teks majemuk atau genre makro diajarkan pada jenjang perguruan tinggi.

Tipe teks yang biasanya diajarkan di sekolah bersifat relatif sederhana dan langsung. Namun kenyataannya, siswa sering diharapkan memproduksi teks yang wujudnya lebih dari satu genre. Misalnya, kita menyebut teks pertama sebagai teks



deskripsi, lalu kita diminta menjelaskan bagaimana cara kerjanya hingga akhirnya berargumen tentang penggunaannya. Pendekatan genre sebagai proses tidak memiliki masalah mengenai teks multigenik semacam ini. Sudut pandang genre sebagai proses tidak mempersoalkan label apa yang diberikan pada teks, tetapi mempersoalkan kebermanfaatannya atau tujuan sosial dari teks tersebut. Pada tahapan selanjutnya, selain mengajarkan struktur teks, guru dapat mengajarkan beragam kaidah kebahasaan yang diperlukan agar peserta didik mampu memproduksi teks sederhana dan teks kompleks dari genre atau subgenre tertentu. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah jenis-jenis teks bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 (Revisi) untuk jenjang SMA.

**Tabel 2**  
**Jenis-Jenis Teks Bahasa Indonesia SMA Kurikulum 2013 (Revisi)**

No.	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
1	Teks laporan hasil observasi	Teks prosedur	Surat lamaran pekerjaan
2.	Teks eksposisi	Teks eksplanasi	Teks cerita sejarah
3.	Teks anekdot	Teks ceramah	Teks Editorial
4.	Teks hikayat	Teks cerpen	Novel
5.	Teks negosiasi	Proposal	Artikel
6.	Teks debat	Karya ilmiah	Kritik dan esai
7.	Teks biografi	Resensi	
8.	Puisi	Drama	

Sumber: Buku Paket Siswa Bahasa Indonesia SMA/SMK/MA/MAK Kelas X (Edisi Revisi 2017), Kelas XI (Edisi Revisi 2017), dan Kelas XII (Edisi Revisi 2018), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel tersebut menggambarkan bahwa materi-materi bahasa Indonesia yang diajarkan di jenjang SMA memang berbasis teks. Hal ini tidak lepas dari salah satu tujuan dari pembelajaran berbasis teks, yakni agar peserta didik mampu mengembangkan struktur berpikirnya. Pengembangan struktur berpikir tersebut dapat dilatih dengan pemahaman terhadap teks-teks tertentu. Sebagai contoh, dari satu topik tertentu, peserta didik dapat dilatih mengemukakan pandangan tentang topik teks dalam berbagai cara. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih kritis ketika memahami suatu pengetahuan baru atau menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika komponen makna (pikiran, konsep) menjadi unsur utama pembentuk bahasa, kemampuan berpikir yang sebaiknya dibentuk melalui bahasa adalah kemampuan berpikir sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis. Pada konsep ini, Mahsun (2014) menamainya sebagai konsep berpikir metodologis. Aplikasi dari konsep berpikir metodologis yang dapat dilakukan guru tecermin dari kegiatan pemodelan, yaitu siswa bekerja sama membangun atau mengembangkan teks dan siswa secara mandiri membangun atau mengembangkan teks yang dibuatnya sendiri. Lebih lanjut, Mahsun menegaskan bahwa kemampuan berpikir metodologis hanya dapat dicapai melalui pembelajaran teks berdasarkan pendekatan ilmiah atau saintifik dengan tahapan aktivitas, seperti pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis. Tahapan-tahapan tersebut dapat diimplementasikan oleh guru di dalam kelas dengan menggunakan beberapa model



pembelajaran, seperti *inquiry based learning*, *discovery based learning*, *problem based learning*, dan *project based learning*. Penerapan model pembelajaran tersebut perlu disesuaikan dengan lingkup materi dan strategi pembelajaran yang digunakan.

Berpikir ilmiah/saintifik hanya dapat berlangsung jika sarana berpikir dan sarana komunikasi, yaitu bahasa verbal selain logika, matematika, dan statistik, mutlak diajarkan. Bahkan, pelajaran bahasa merupakan satu-satunya pelajaran yang dapat dijadikan media pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013 (Revisi), termasuk materi, proses, dan penilaian dalam pembelajarannya perlu diubah secara mendasar, yaitu dengan menerapkan pembelajaran teks. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat dikaitkan dengan konsep ini adalah pendekatan ilmiah berbasis proyek. Hal tersebut, menurut Mahsun (2014), didasari pada beberapa alasan sebagai berikut.

- a. Untuk menghasilkan teks diperlukan data/informasi/fakta yang akan menjadi substansi/isi teks itu sendiri.
- b. Data/informasi/fakta itu harus dapat diidentifikasi wujudnya, sumbernya, cara memperolehnya, serta cara menginterpretasi atau menganalisis dan mengomunikasikan.
- c. Dalam pengidentifikasian wujud, sumber, cara memperoleh, cara menganalisis, serta pemerolehan dan penganalisisan data/informasi/fakta itu diperlukan perencanaan waktu yang tegas.
- d. Perencanaan waktu pelaksanaan yang tegas harus sampai pada tahap pengomunikasian hasil analisis yang berwujud teks tertentu yang dihasilkan itu.
- e. Untuk menghasilkan teks tertentu, perlu dilakukan pembelajaran yang bertumpu pada upaya melakukan suatu kegiatan dengan tujuan khusus.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, ensiklopedia, internet, dan sebagainya. Sumber data yang digunakan berasal dari buku teks Bahasa Indonesia kelas X, XI, dan XII Kurikulum 2013 (Revisi) yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud tahun 2017 untuk kelas X dan XI serta tahun 2018 untuk kelas XII. Selanjutnya, peneliti melakukan pemetaan genre teks dari sumber data tersebut untuk kemudian diinterpretasi berdasarkan teori yang digunakan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pemetaan Genre Teks Bahasa Indonesia SMA Kurikulum 2013 (Revisi)**

Pembahasan tentang genre berkaitan dengan berbagai macam teks termasuk perbedaan mendasar pada tujuan sosial teks dan cara menata strukturnya (struktur berpikir). Secara umum, teks dapat diklasifikasi atas teks tunggal atau genre mikro dan teks majemuk atau genre makro. Teks tunggal adalah teks yang dibentuk dari satu jenis teks tertentu, misalnya, teks deskripsi, teks eksplanasi, dan teks cerpen. Sementara itu, teks majemuk adalah teks kompleks dengan struktur yang lebih besar dan tersegmentasi ke dalam bagian-bagian yang dapat berupa bab, subbab, atau seksi, subseksi.



Untuk jenjang SMA, meski pembelajaran teks masih didominasi oleh teks-teks tunggal, ada kalanya teks-teks majemuk juga dipelajari. Beberapa contoh dari teks majemuk yang dipelajari di jenjang SMA adalah teks proposal penelitian, karya tulis ilmiah, dan novel. Teks dari genre atau subgenre tertentu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan pemaparan genre teks bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013 (Revisi) jenjang SMA yang berkaitan dengan ruang lingkup kompetensi berbasis teks (genre).

**Tabel 3**  
**Pemetaan Genre Teks Bahasa Indonesia SMA Kurikulum 2013 (Revisi)**

No.	GENRE/ SUBGENRE	JENIS TEKS	STRUKTUR TEKS	KELAS
<b>I. SAstra/ PENCERITAAN</b>				
1.1	NARATIF Tujuan sosial: menceritakan kejadian	Teks anekdot	Abstraksi Orientasi Krisis Reaksi Koda	Kelas X
		Tujuan sosial: menceritakan berbagai reaksi emosional dalam sebuah cerita.		
		Teks hikayat	Pengenalan cerita atau asal muasal tokoh utama Peristiwa yang dialami tokoh utama Konflik Penyelesaian	
		Tujuan sosial: menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita		
		Teks biografi	Orientasi Kejadian penting Reorientasi	
		Tujuan sosial: menceritakan tahapan kehidupan		
		Teks cerpen	Pengenalan cerita ( <i>exposition, orientation</i> ) Pengungkapan peristiwa ( <i>complication</i> ) Menuju pada konflik ( <i>rising action</i> ) Puncak konflik ( <i>turning point</i> ) Penyelesaian ( <i>ending/ coda</i> )	
		Tujuan sosial: menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita		
		Teks drama	Prolog Dialog (orientasi, komplikasi, resolusi) Epilog	Kelas XI
		Tujuan sosial: menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita		



		<p>Teks cerita sejarah</p> <p>Tujuan sosial: menceritakan peristiwa sejarah</p>	<p>Pengenalan situasi cerita (orientasi)</p> <p>Pengungkapan peristiwa Menuju konflik (<i>rising action</i>)</p> <p>Puncak konflik (komplikasi)</p> <p>Penyelesaian (resolusi)</p> <p>Koda</p>	Kelas XII	
		<p>Teks novel</p> <p>Tujuan sosial: menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita</p>	<p>(Edisi 2017)</p> <p>Abstrak</p> <p>Orientasi</p> <p>Komplikasi</p> <p>Evaluasi</p> <p>Resolusi</p> <p>Koda (opsional)</p> <p>(Edisi 2018)</p> <p>Tema</p> <p>Tokoh dan karakter</p> <p>Alur (<i>plot</i>)</p> <p>Latar (<i>setting</i>)</p> <p>Sudut pandang</p> <p>Amanat</p>		
1.2	NONNARATIF	<p>Puisi</p> <p>Tujuan sosial: mendeskripsikan kejadian atau isu</p>	<p>Suasana</p> <p>Tema puisi</p> <p>Makna puisi</p> <p>Pengimajian</p> <p>Kata konkret</p> <p>Rima (persajakan)</p> <p>Versi Mahsun (2014)</p> <p>Tidak terstruktur</p>	Kelas X	
<b>II. FAKTUAL</b>					
2.1	LAPORAN	<p>Tujuan sosial: melaporkan kejadian/isu atau melaporkan secara umum tentang berbagai kelas benda</p>	<p>Teks laporan hasil observasi</p> <p>Tujuan sosial: memberikan informasi umum tentang berbagai kelas benda, seperti harimau, batu, pohon, dan ular</p>	<p>Pernyataan umum atau klasifikasi</p> <p>Deskripsi bagian</p> <p>Deskripsi manfaat</p>	Kelas X
		<p>Karya ilmiah</p> <p>Tujuan sosial: memberikan laporan tentang</p>	<p>Judul</p> <p>Pendahuluan (latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat)</p>	Kelas XI	





		<p>kajian terhadap suatu objek ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis atas tahapan pengumpulan, analisis, dan penyajian hasil analisis data</p>	<p>Kerangka teoretis Metodologi penelitian Pembahasan Simpulan dan Saran Daftar Pustaka</p>	
		<p>Resensi</p> <p>Tujuan sosial: Menilai daya tarik dari suatu karya</p>	<p>Judul resensi Identitas buku yang dirensi Pendahuluan (memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku, dll.) Inti/isi resensi Keunggulan buku Kekurangan buku Penutup</p>	
2.2	<p>PROSEDURAL/ ARAHAN</p> <p>Tujuan sosial: mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah yang telah ditentukan</p>	<p>Teks prosedur</p> <p>Tujuan sosial: bagaimana melakukan percobaan atau pengamatan</p>	<p>Tujuan Langkah-langkah (petunjuk) Penegasan ulang (penutup)</p>	<p>Kelas XI</p>
<b>III. TANGGAPAN</b>				
3.1	<p>TRANSAKSIONAL</p> <p>Tujuan sosial: menegosiasikan hubungan, informasi barang dan layanan</p>	<p>Teks negosiasi</p> <p>Tujuan sosial: mencari kesepakatan</p> <p>Proposal</p> <p>Tujuan sosial: menegosiasikan hubungan atas rencana suatu kegiatan</p>	<p>Orientasi Pengajuan Penawaran Persetujuan</p> <p>Proposal ilmiah: Judul proposal Pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, definisi operasional) Tinjauan pustaka</p>	<p>Kelas X</p> <p>Kelas XI</p>



			<p>Metode penelitian Jadwal pelaksanaan Rencana anggaran Daftar pustaka</p> <p>Proposal penelitian: Latar belakang masalah Perumusan masalah Tujuan penelitian Manfaat penelitian Landasan teori Metode penelitian Kerangka penulisan laporan Daftar pustaka</p> <p>Proposal kegiatan:</p> <p>Latar belakang Masalah dan tujuan Ruang lingkup kegiatan (objek dan jenis-jenis kegiatan) Kerangka teoretis dan hipotesis Metode Pelaksana kegiatan (penanggung jawab dan susunan personalia) Fasilitas yang tersedia (sarana dan peralatan) Keuntungan dan kerugian Lama waktu dan tempat pelaksanaan Anggaran biaya Daftar pustaka Lampiran-lampiran</p> <p>Proposal pelatihan:</p> <p>Latar belakang Tujuan pelatihan Materi pelatihan Peserta Pendekatan, metode, dan skenario pelatihan</p>	
--	--	--	--	--



			<p>Sarana dan media pelatihan Waktu dan tempat pelatihan</p> <p>*Sistematika proposal bersifat fleksibel, bergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta lembaga yang hendak dituju.</p>	
3.2	<p><b>EKSPOSITORI</b></p> <p>Tujuan sosial: menjelaskan atau menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu</p>	<p>Teks eksposisi</p> <p>Tujuan sosial: mendebat suatu sudut pandang</p>	<p>Tesis atau pernyataan pendapat</p> <p>Argumentasi</p> <p>Penegasan ulang</p>	Kelas X
		<p>Teks debat</p> <p>Tujuan sosial: bereaksi emosional terhadap sebuah isu</p>	<p>Pengenalan</p> <p>Penyampaian argumentasi</p> <p>Debat</p> <p>Simpulan</p>	
		<p>Teks eksplanasi</p> <p>Tujuan sosial: memaknai pesan suatu teks</p>	<p>Identifikasi fenomena (latar belakang kejadian)</p> <p>Proses kejadian (kronologis penyebab)</p> <p>Ulasan (mengomentari konsekuensi)</p>	Kelas XI
		<p>Teks ceramah</p> <p>Tujuan sosial: menyampaikan hal-hal yang persuasif</p>	<p>Salam pembuka</p> <p>Pendahuluan (tesis) yang terdiri atas isu, permasalahan, pandangan umum penulis</p> <p>Isi (rangkaian argumen) yang terdiri atas pendapat-pendapat dan fakta</p> <p>Penutup (penegasan kembali) yang terdiri atas simpulan dan rangkuman</p> <p>Salam penutup</p>	
		<p>Surat lamaran pekerjaan</p> <p>Tujuan sosial: menjelaskan data diri untuk keperluan</p>	<p>Tesis (pernyataan umum) yang berfungsi sebagai informasi awal (data pribadi) terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar</p>	Kelas XII



		melamar pekerjaan	Argumentasi sebagai penguat tesis.  Sistematika surat lamaran pekerjaan: Tempat dan tanggal pembuatan surat Lampiran dan hal Alamat surat Salam pembuka Alinea pembuka Isi Penutup Salam penutup Tanda tangan dan nama terang	
		Teks Artikel  Tujuan sosial: menjelaskan suatu berita/informasi	Tesis Argumentasi Pernyataan ulang pendapat (reiterasi)	
		Teks editorial  Tujuan sosial: menanggapi suatu isu atau kejadian dari sudut pandang pribadi	Pengenalan isu Penyampaian pendapat/argumen Penegasan	
		Teks kritik dan esai  Tujuan sosial: menanggapi suatu isu atau kejadian dari sudut pandang pribadi (esai) dengan data-data (kritik)	Pernyataan pendapat (tesis) Argumen Penegasan ulang	

Sumber: Tabel diadaptasi dari konsep genre teks menurut Mahsun, 2014

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa satu genre dapat terdiri atas satu atau beberapa jenis teks yang berbeda dengan tujuan sosial atau komunikasi yang sama atau berbeda (Martin dan Rose, 2008). Sebagai contoh, genre cerita



dengan subgenre naratif terdiri atas teks anekdot, teks biografi, dan teks cerpen. Tujuan utama dari teks anekdot adalah menghibur dengan mengedepankan aspek jenaka cerita yang disajikan. Reaksi pembaca/pendengar terhadap kelucuan cerita itulah aspek penting anekdot. Jika dilihat berdasarkan fungsi umumnya, teks anekdot sama dengan teks-teks lainnya, seperti teks cerpen atau novel. Fungsi umum teks anekdot adalah menyampaikan sebuah cerita sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan peristiwa yang diceritakan itu (Kosasih, 2016).

Selain teks anekdot, teks biografi juga memiliki tujuan menceritakan, tetapi dengan gaya yang berbeda. Pada teks biografi, penceritaan yang dilakukan berkaitan dengan tahapan kehidupan seseorang. Hal yang sama juga dapat dilihat dari teks cerpen. Akan tetapi, tujuan sosial teks cerpen adalah menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita.

Contoh lain pemetaan genre berdasarkan kemiripan struktur, misalnya, adalah jenis teks eksposisi, teks editorial, teks artikel, serta teks kritik dan esai. Keempat jenis teks tersebut memiliki struktur teks yang mirip, yakni tesis atau pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan ulang. Selain struktur, tujuan sosial genre teks tersebut juga sejalan, yakni sama-sama berusaha menjelaskan atau menganalisis suatu hal. Oleh karena itu, teks-teks tersebut dimasukkan dalam genre yang sama, yakni genre tanggapan dengan subgenre ekspositori. Namun, pada perkembangan dan penelitian selanjutnya, tidak menutup kemungkinan bahwa satu jenis teks dapat pula mengisi beberapa genre. Hal itu didasari pada konteks dan tujuan sosial yang ingin disampaikan teks tersebut dapat dijelaskan dengan dasar pemikiran yang kuat dan teori yang mendukung.

Selanjutnya, pemetaan tersebut juga menjelaskan bahwa jenis-jenis teks bahasa Indonesia di kelas X SMA didominasi oleh genre cerita dengan subgenre naratif. Dengan kata lain, pembelajaran teks di kelas X lebih banyak berkaitan dengan konsep penceritaan tiap-tiap teks yang termasuk dalam genre cerita dengan tujuan sosial yang berbeda-beda. Di jenjang ini peserta didik dapat lebih bebas mengekspresikan diri dalam beragam bentuk teks naratif atau nonnaratif (puisi).

Di kelas XI jenis-jenis teks didominasi oleh genre faktual dengan subgenre laporan dan genre tanggapan dengan subgenre ekspositori. Berbeda dengan kelas X, di kelas XI ini struktur berpikir peserta didik lebih banyak diarahkan pada hal-hal yang bersifat faktual, misalnya, dalam membuat karya tulis, resensi buku, atau langkah-langkah dalam mengaplikasikan sesuatu. Selain itu, peserta didik juga mulai diarahkan pada teks-teks yang membutuhkan tanggapan secara kritis atau analisis lebih dalam, misalnya, teks yang berkaitan dengan fenomena-fenomena alam atau sosial (teks eksplanasi). Sementara itu, di kelas XII, jenis-jenis teks didominasi oleh genre tanggapan dengan subgenre ekspositori. Pembelajaran teks di kelas XII berupaya agar peserta didik memiliki keberanian dan rasa percaya diri ketika berpendapat serta mampu menganalisisnya dengan bukti atau fakta-fakta yang jelas. Kemampuan tersebut dapat terasah ketika peserta didik diminta menulis contoh teks artikel, editorial, kritik, atau esai.

## **PENUTUP**

Pemetaan genre teks bahasa Indonesia merupakan salah satu upaya memudahkan guru dalam mengajarkan jenis-jenis teks. Meski kurikulum berubah-ubah, selama basisnya masih menggunakan teks, guru tetap dapat menggunakan pemetaan genre teks ini dalam proses pembelajaran di kelas. Pemetaan genre teks



ini dilakukan dengan cara memasukkan jenis-jenis teks ke dalam genre tertentu sesuai dengan tujuan sosial genre tersebut. Satu genre dapat berisi beberapa jenis teks bergantung pada kesamaan tujuan atau struktur teksnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari satu jenis teks dapat dikelompokkan ke dalam beberapa genre.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa jenis-jenis teks yang termasuk genre cerita dengan subgenre naratif terdapat pada teks anekdot (kelas X), teks hikayat (kelas X), teks biografi (kelas X), teks cerpen (kelas X), teks drama (kelas XI), teks cerita sejarah (kelas XII), dan teks novel (kelas XII). Sementara itu, puisi (kelas X) termasuk dalam genre cerita dengan subgenre nonnaratif. Jenis-jenis teks yang termasuk genre faktual dengan subgenre laporan, antara lain, adalah teks laporan hasil observasi (kelas X), karya ilmiah (kelas XI), dan resensi (kelas XI). Sementara itu, jenis teks prosedur (kelas XI) termasuk dalam genre faktual dengan subgenre prosedural. Jenis-jenis teks yang termasuk dalam genre tanggapan dengan subgenre transaksional, antara lain, adalah negosiasi (kelas XI) dan proposal (kelas XI). Sementara itu, teks eksposisi (kelas X), teks debat (kelas X), teks eksplanasi (kelas XI), teks ceramah (kelas XI), surat lamaran pekerjaan (kelas XII), teks artikel (kelas XII), teks editorial (kelas XII), dan teks kritik dan esai (kelas XII) termasuk ke dalam subgenre tanggapan dengan subgenre ekspositori.

Guru dapat menggunakan pemetaan tersebut dalam bentuk kegiatan pembelajaran seperti kegiatan pemodelan, termasuk di dalamnya kegiatan membangun konteks, kegiatan mengembangkan teks secara bersama-sama, dan kegiatan mengembangkan teks secara mandiri yang dilakukan oleh peserta didik. Dalam mengajarkan teks, guru dapat menggunakan pendekatan saintifik berbasis proyek atau bahkan dengan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Halliday, M.A.K. dan Ruqaiya Hasan. (1992). *Bahasa, Konteks, dan Teks*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kosasih, E. (2016). *Jenis-Jenis Teks: Analisis Fungsi, Struktur, dan Kaidah serta Langkah Penulisan dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA/ MA/ SMK*. Bandung: Yrama Widya.
- Mahsun. (2014). *Teks Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martin, J. R. dan Rose, D. (2008). *Genre Relation*. Ebook.
- Nurhadi. (2016). *Teknik Membaca*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Priyatni, Endah Tri dan Nurhadi. (2017). *Membaca Kritis dan Literasi Kritis*. Tangerang: Tira Smart.
- Suherli dkk. (2017). *Bahasa Indonesia Kelas X SMA/ MA/ SMK/ MAK*. (edisi revisi 2017). Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- Suherli dkk. (2017). *Bahasa Indonesia Kelas XI SMA/ MA/ SMK/ MAK*. (edisi revisi 2017). Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- Suryaman, Maman. (2018). *Bahasa Indonesia Kelas XII SMA/ MA/ SMK/ MAK*. (edisi revisi). Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 1 Kelompok 2**

Pembicara : Khusnul Fatonah dan Gunawan Wiradharma  
Judul Makalah : “Pemetaan Genre Teks Bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013 (Revisi) Jenjang SMA”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 08.00—09.30  
Moderator : Dr. Fairul Zabadi  
Pencatat : 1. Dewi Khairiah  
2. Nadia Almira Sagitta

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Penelitian ini merupakan pemetaan teks-teks yang digunakan dalam Kurikulum 2013 (Kurtilas) dan Kurtilas Revisi pada buku SMA.
2. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks diterapkan sejak penerapan Kurikulum 2013. Kurikulum ini terakhir direvisi pada 2018.
3. Guru memerlukan acuan pemetaan genre teks karena adanya perubahan atas jenis-jenis teks yang ada dalam revisi Kurtilas. Misalnya, Kurtilas tidak memasukkan teks lamaran pekerjaan, tetapi Kurtilas Revisi memunculkannya kembali.
4. Teks adalah satuan bahasa yang memiliki struktur lengkap, terikat konteks, dan dapat memunculkan interaksi sosial.
5. Genre adalah jenis teks yang berfungsi sebagai rujukan agar suatu teks dapat dibuat lebih efektif sesuai dengan tujuan sosialnya.
6. Pengklasifikasian genre dalam penelitian ini diambil dari sudut penceritaannya, yakni genre sastra dan genre nonsastra. Genre utama sastra memiliki genre cerita dengan subgenre naratif dan nonnaratif, sedangkan genre utama nonsastra memiliki genre faktual dengan subgenre laporan dan prosedural dan genre tanggapan dengan subgenre transaksional dan ekspositori. Satu genre bisa terdiri atas beberapa jenis teks.
7. Fokus utama kurtilas adalah menjadikan pembelajaran bahasa lebih fungsional dan lebih bermanfaat, berbeda dengan KTSP yang memang struktural. Meskipun Kurtilas lebih fungsional, kaidah struktural pasti muncul ketika mengajarkan kaidah kebahasaan.
8. Semakin banyak jenis teks yang siswa kenali maka semakin lengkap struktur berpikir siswa.
9. Terdapat 22 jenis teks di Kurtilas SMA.
10. Kelas X mempelajari teks anekdot, hikayat, biografi, cerpen untuk subgenre naratif, sedangkan subgenre nonnaratif adalah teks puisi. Untuk genre faktual, ada teks hasil observasi. Untuk genre tanggapan, ada teks negosiasi, teks eksposisi, dan teks debat.
11. Kelas XI mempelajari teks drama. Untuk genre faktual ada teks karya ilmiah, resensi, dan prosedur. Untuk genre tanggapan ada teks proposal, teks eksplanasi, dan teks ceramah.



12. Kelas XII mempelajari teks cerita sejarah dan novel. Untuk genre tanggapan ada teks lamaran pekerjaan, teks artikel, teks editorial, serta teks kritik dan esai.
13. Dari penelitian ini, didapatkan bahwa genre yang mendominasi teks-teks kelas X adalah genre cerita dengan subgenre naratif. Kelas XI didominasi oleh genre faktual khususnya laporan dan tanggapan khususnya ekspositori. Teks yang dominan untuk kelas XII adalah teks tanggapan dengan subgenre ekspositori.

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Rosendri  
Instansi : Yogyakarta

#### **Pertanyaan:**

Apakah genre teks harus ada semua atau harus disesuaikan dengan RPP di perguruan tinggi? Jika tidak, bagaimana?

#### **Jawaban :**

Genre teks ini bisa berkembang. Jadi, jenisnya tidak mutlak. Barangkali ketika mengajar, Ibu menemukan genre atau subgenre baru. Jadi, jenis teks disesuaikan dengan kebutuhan.

#### **Penanya 2**

Nama : Munirah  
Instansi : Universitas Muhammadiyah Makasar

#### **Pertanyaan:**

Kurtilas teks fungsional, tetapi saya melihat teks sudah memadukan struktur dengan keterampilan (Kompetensi Dasar 3 dan 4).

#### **Jawaban:**

Memang Kurtilas Revisi merupakan paduan antara keterampilan dan kognitif. Ini bisa dilihat pada Kompetensi Dasar 3 dan 4.

#### **Penanya 3**

Nama : Seni Asniyati  
Instansi : SMPN 231 Jakarta

#### **Pertanyaan:**

Di SMA ada teks ulasan. Di SMP ada teks tanggapan, khususnya meresensi buku. Apakah struktur teks itu sudah baku? Sebab ada pula teks ulasan pada tingkat SMA.

#### **Jawaban:**

Itu hanya pendalaman materi saja, tidak sedalam SMA. Misalnya, anak SMP meresensi sebuah novel, tetapi strukturnya ulasan. Guru sebaiknya fokus ke tujuan sosial meresensinya tanpa memasalahkan perbedaannya. Apabila siswa mengeluh sulit menulis, sarankan terus menulis tanpa memikirkan strukturnya. Kalau diminta membuat strukturnya, tinggal menyesuaikan saja. Saya menemukan kesulitan mendefinisikan orientasi, evaluasi, reorientasi, dll. karena di KBBI belum





jelas maknanya. Masukan untuk Badan Bahasa supaya menambahkan makna orientasi, evaluasi, dan komplikasi dengan mengaitkannya ke Kurtilas.

**Penanya 4**

Nama : Edi Sukardi  
Instansi : Himpunan Pembina Bahasa Indonesia

**Pertanyaan:**

Puisi ditempatkan dalam kategori apa?

**Jawaban:**

Puisi masuk ke genre sastra, subgenre nonnaratif.

**Penanya 5**

Nama : Agung Budiarti  
Instansi : SMP 2 Pasuruan

**Pertanyaan:**

Struktur cerpen mengalami perubahan dalam Kurtilas. Tahun lalu ada koda, sekarang tidak ada. Ketika kementerian mengedarkan buku dan kita memiliki persepsi lama tentang struktur cerpen, bagaimana? Untuk singkatnya, saya menjelaskan ada pembuka, isi, dan penutup dalam cerpen dan harus mencakup unsur intrinsik dan ekstrinsik. Pada hakikatnya, ketika anak menulis, hasilnya tidak dilihat dari strukturnya, tetapi dari nilai yang diusung, kecantikan penyajian, dan cara mengemas konflik. Kita menghadirkan konflik, bukan sekadar alur. Struktur kemarin berbeda dengan sekarang. Bagaimana dengan peredaran buku yang ada? Apakah kita mengacu yang lama atau yang baru?

**Jawaban:**

Alasan cerpen lebih dominan konflik karena salah satu tujuan teks pengisahan adalah menyelesaikan masalah.

**Isu-Isu Penting:**

1. Masukan untuk Badan Bahasa supaya menambahkan makna orientasi, evaluasi, komplikasi dan mengaitkannya dengan Kurtilas.
2. Menurut Mahsun (2014) perubahan Kurtilas Revisi terlalu jauh dan memaksakan terlalu banyak jenis teks. Misalnya, belum diajari ringkasan, tetapi siswa harus membuat ringkasan atas hasil laporan.
3. Ada masalah dalam pemilihan teks sebab gagasan utama tidak berkesinambungan.
4. Kekurangan Kurtilas bukan pada konsep, melainkan pada masalah pelatihan guru. Seharusnya pelatihan guru diambil alih Badan Bahasa. Tampaknya Badan Bahasa jauh dari kegiatan pendidikan.
5. Sebaiknya tugas yang diberikan memenuhi empat ranah keterampilan berbahasa: mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca agar waktu guru menjadi lebih efektif.
6. Semakin banyak jenis teks yang siswa kenali maka semakin lengkap struktur berpikir siswa.



## 7. Asesmen Autentik Pembelajaran Bahasa Indonesia SMA: Pemanfaatan Instrumen Berdasarkan Analisis Kebutuhan

### ASESMEN AUTENTIK PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA SMA: PEMANFAATAN INSTRUMEN BERDASARKAN ANALISIS KEBUTUHAN

**Murtiana Nainggolan, Benedictus Sudyana, dan Yohanes Sugiyanto**  
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo  
murtiana88@gmail.com

#### **Abstrak**

Asesmen pembelajaran bahasa Indonesia di SMA yang berkelanjutan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas asesmen itu sendiri. Salah satu penerapannya adalah melalui tugas autentik pada buku teks siswa yang direlevansikan dengan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun tujuannya adalah menjelaskan tugas autentik sebagai asesmen dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) yang diharapkan memenuhi analisis kebutuhan dan asesmen pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dibahas dengan bahan-bahan pustaka yang relevan dan bersifat *on going*. Sumber data tugas autentik dari tujuh buku teks siswa Bahasa Indonesia SMA dari kelas X, XI, dan XII dianalisis dengan metode Miles & Huberman, yaitu model interaktif yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifikasi. Pemeriksaan keabsahan data yang dilaksanakan, antara lain: (1) pengecekan sejawat, (2) kecukupan referensi yang relevan, (3) konsultasi dosen pembimbing, (4) teknik triangulasi sumber, dan (5) ketekunan atau keajegan pengamatan. Hasilnya analisis kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilaksanakan melalui tugas autentik pada buku teks siswa. Hal ini ditunjukkan dengan (1) mampu mendeskripsikan penggunaan asesmen autentik pada buku teks siswa berdasarkan analisis kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, (2) dapat mengklasifikasikan jenis-jenis asesmen autentik pembelajaran bahasa Indonesia di SMA berdasarkan keterampilan berbahasa, (3) dapat mengklasifikasikan jenis asesmen autentik pembelajaran bahasa Indonesia di SMA berdasarkan tiga ranah asesmen, dan (4) mampu menjelaskan relevansi asesmen autentik pada buku teks siswa SMA dengan kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dan Kurikulum 2013.

**Kata-kata kunci:** asesmen autentik, pembelajaran bahasa Indonesia, instrumen asesmen, analisis kebutuhan

#### **Abstract**

*Assessment needs of sustainable Indonesian high school learning are needed to improve the quality of the assessment itself. One of the applications is through authentic assignments in student textbooks that are relevant to the Basic Competencies of Indonesian Language. The purpose is to explain authentic assignments as assessments in teaching and learning that are expected to meet the need analysis and assessment of Indonesian language learning. The research method uses descriptive qualitative research. Research is discussed by using library*



*materials that are relevant and on going. Sources of authentic assignment data from 7 high school Indonesian students textbooks from class X, XI, and XII were analyzed by the Miles & Huberman method which is an interactive model, which was conducted simultaneously with the data collection process (data collection), data reduction, data display, and conclusions or verification (drawing & verifying conclusion). Examination of the validity of the data carried out included: (1) peer checking, (2) relevant reference adequacy, (3) advisory counseling, (4) source triangulation techniques, and (5) observation persistence. As a result, the analysis of the needs of Indonesian language learning can be carried out through authentic assignments in student textbooks. This is indicated by (1) being able to describe the use of authentic assessments in student textbooks based on an analysis of the needs of Indonesian language learning in high schools, (2) to classify authentic types of assessment of Indonesian language learning in high school based on language skills, (3) can classify authentic types of assessment of Indonesian language learning in high school based on three assessment areas, and (4) to explain the relevance of authentic assessment of high school students' textbooks to Indonesian language learning needs based on Curriculum Education Unit Level 2006 and Curriculum 2013.*

**Keywords:** *authentic assessment, Indonesian language learning, assessment instruments, needs analysis*

## **PENDAHULUAN**

Asesmen ada yang bersifat autentik dan ada pula yang nonautentik. Yang dimaksud dengan asesmen nonautentik adalah asesmen tradisional atau asesmen konvensional. Asesmen nonautentik belum dapat memenuhi kebutuhan asesmen pembelajaran pada kurikulum yang berbasis kompetensi dengan tuntutan inovasi sistem asesmen pendidikan. Adapun penelitian tentang asesmen autentik masih dibutuhkan dengan pertimbangan-pertimbangan: (1) penerapan pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia yang belum maksimal, (2) hasil pemeringkatan pendidikan nasional dari program internasional, (3) asesmen mata pelajaran Bahasa Indonesia yang didominasi dengan satu metode tes tertulis, (4) kebutuhan asesmen Bahasa Indonesia, (5) perkembangan iptek menimbulkan inovasi-inovasi baru dalam sistem pendidikan yaitu bidang asesmen, dan (6) pengalaman guru tentang pengembangan instrumen asesmen autentik masih rendah (Yulmiati, 2014). Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan penggunaan asesmen autentik pada buku teks siswa berdasarkan analisis kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia, (2) mengklasifikasikan jenis-jenis asesmen autentik berdasarkan keterampilan berbahasa, (3) mengklasifikasikan jenis asesmen autentik pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan tiga ranah asesmen, dan (4) menjelaskan relevansi asesmen autentik pada buku teks siswa dengan kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan KTSP 2006 dan Kurikulum 2013.

### **Makna Asesmen Autentik**

Asesmen adalah proses pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pendidikan, mutu program pendidikan, mutu kurikulum, mutu pengajaran, atau sejauh mana pengetahuan yang diterima siswa tentang bahan ajar yang telah diajarkan kepadanya (Basuki dan Hariyanto, 2015). Asesmen autentik mempunyai pengertian sebagai asesmen atas



perkembangan siswa karena berfokus pada kemampuan mereka berkembang untuk belajar dan bagaimana proses belajarnya pada mata pelajaran tertentu. Situasi tersebut menuntut guru agar lebih proaktif sebagai fasilitator pembelajaran siswa dan mengevaluasi strategi pembelajaran yang telah diterapkannya (Kemendikbud, 2014c; Mansyur dkk., 2015; dan Sani, 2016). Asesmen autentik tidak mengondisikan siswa belajar secara hafalan, tetapi lebih melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan seperti melakukan eksperimen sains, riset sosial, penulisan laporan, membaca, dan menginterpretasi literatur.

#### **Karakteristik Asesmen Autentik**

Asesmen autentik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan asesmen konvensional atau asesmen tradisional atau asesmen nonautentik.

**Tabel 1**  
**Perbedaan Asesmen Nonautentik dan Asesmen Autentik**

No.	Asesmen Nonautentik	Asesmen Autentik
1.	Misi sekolah adalah mengembangkan warga negara yang produktif.	Misi sekolah adalah mengembangkan warga negara yang produktif.
2.	Menjadi warga negara produktif, seseorang harus menguasai disiplin keilmuan dan keterampilan tertentu.	Menjadi warga negara produktif, seseorang harus mampu menunjukkan penguasaan melakukan sesuatu secara bermakna dalam dunia nyata.
3.	Sekolah mesti mengajarkan peserta didik disiplin keilmuan dan keterampilan tersebut.	Sekolah mesti mengembangkan peserta didik agar dapat mendemonstrasikan kemampuan atau keterampilan melakukan sesuatu.
4.	Mengukur keberhasilan pembelajaran, guru harus mengetes siswa untuk mengetahui tingkat penguasaan keilmuan dan keterampilan.	Mengukur keberhasilan pembelajaran, guru meminta siswa melakukan aktivitas tertentu secara bermakna yang mencerminkan aktivitas dunia nyata.
5.	Kurikulum menentukan asesmen, yaitu pengetahuan yang harus dikuasai ditentukan terlebih dahulu.	Asesmen menentukan kurikulum sehingga guru memberikan tugas-tugas kepada siswa untuk menunjukkan penguasaan siswa.

(Nurgiyantoro, 2015: 26 dan Ngadip, TT: 5)

#### **Bahasa Indonesia pada KTSP 2006**

Dalam Kurikulum KTSP, asesmen mengarah pada kompetensi siswa. Asesmen bahasa Indonesia pada KTSP 2006 meliputi keterampilan mendengarkan atau menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis.

Langsung, apresiatif, reseptif, fungsional	Mendengarkan	Komunikasi Tatap Muka	Berbicara	Langsung, produktif, ekspresif
--	--------------	-----------------------	-----------	--------------------------------



		Keterampilan Berbahasa		
Tak langsung, produktif, ekspresif	Menulis	Komunikasi Tidak Muka	Membaca Tatap	Tak langsung, apresiatif, reseptif, Fungsional

**Gambar 1**  
**Asesmen dalam KTSP 2006**  
(Swandono, 1997: 1; dan Tarigan, 2008a/2008b: 2)

### Bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013

Pembelajaran bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013 mengimplementasikan empat prinsip, yaitu (1) bahasa hendaknya dijadikan teks, bukan hanya kumpulan kata, (2) penggunaan bahasa merupakan pemilihan bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna, (3) bahasa bersifat fungsional, yaitu penggunaan bahasa yang tidak pernah lepas konteks karena bentuk bahasa mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunanya, dan (4) bahasa sebagai sarana pembentukan kemampuan berpikir manusia (Kemendikbud, 2014d dan Kusumaningsih, 2015). Laporan hasil belajar siswa ditentukan dari tiga aspek asesmen, yaitu asesmen sikap, asesmen kognitif, dan asesmen psikomotorik.

**Tabel 2**  
**Deskripsi Kompetensi Kurikulum 2013**

Kompetensi	Deskripsi Pembelajaran Berkelanjutan	KI
Pengetahuan	Pengetahuan tentang jenis, kaidah, dan konteks suatu teks	3
Keterampilan	Keterampilan menyajikan suatu teks tulis dan lisan baik terencana maupun spontan	4
Sikap	Pembentukan sikap kesantunan dan kejelian berbahasa serta sikap penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai warisan budaya bangsa	1 2

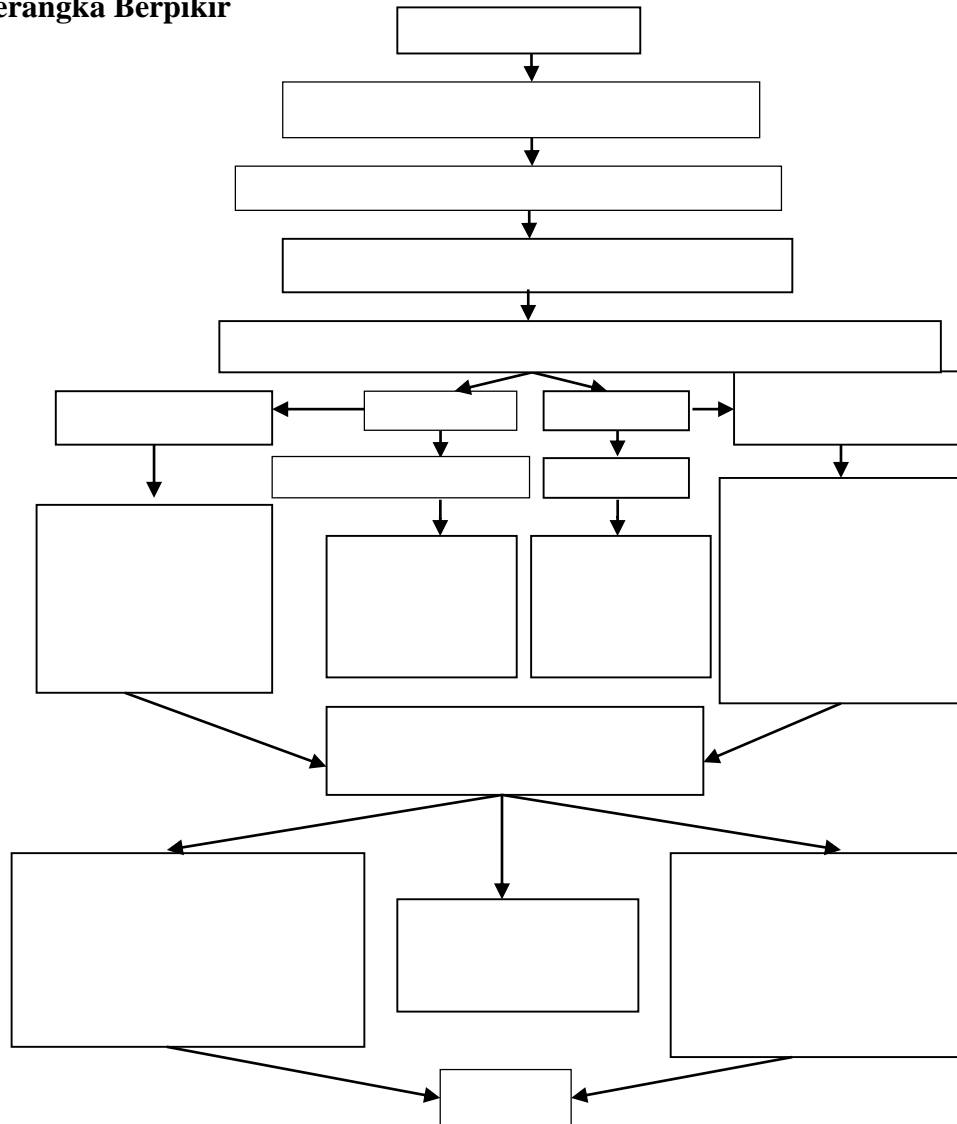
(Inayatillah, TT: 156)

### Analisis Kebutuhan Pembelajaran Bahasa Indonesia SMA

Pembelajaran bahasa Indonesia dapat sampai pada tujuannya jika kita mengetahui analisis kebutuhan pembelajaran itu sendiri. Brown (dalam Nurhayati, TT) menjelaskan bahwa analisis kebutuhan, yang disebut juga *needs assessment*, mengacu pada kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan informasi yang digunakan sebagai pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan mengemban kebutuhan komunikasi dan penghela ilmu lain (Sulistiyowati, 2015 dan Inayatillah, TT). Sementara itu, Suwandi (2015) berpendapat bahwa peningkatan mutu pembelajaran bahasa Indonesia terjadi jika pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra, dan meningkatkan profesionalisme guru, terutama dalam pemahaman lintas budaya. Jadi, analisis kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia SMA berdasarkan kajian domain bahasa Indonesia meliputi, antara lain: (1) kebutuhan komunikasi, (2) kebutuhan karakter, (3) kebutuhan informasi, (4) kebutuhan penghela ilmu lain, dan

(5) kebutuhan apresiasi sastra. Adapun analisis kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan kebutuhan capaian belajar diklasifikasikan berdasarkan jenjang kelas di SMA sesuai dengan kompetensi dasar, baik pada KTSP 2006 maupun Kurikulum 2013, yaitu kebutuhan capaian belajar kelas X, kebutuhan capaian belajar kelas XI, dan kebutuhan capaian belajar kelas XII.

### Kerangka Berpikir



**Gambar 2**  
**Kerangka Berpikir**

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif. Dalam penelitian ini dikaji bahan-bahan pustaka yang relevan dan bersifat *on going*. Bahan studi kepustakaan sebagai sumber referensi bermacam-macam, antara lain, jurnal penelitian, laporan hasil penelitian, abstrak, narasumber, buku, surat kabar, majalah, peraturan perundangan nasional, dan internet (Sukardi, 2005). Pengkajian asesmen autentik ini didominasi dengan sifat deskriptif dan eksplanatori, yaitu memberikan eksplanasi atau penjelasan tentang fenomena penerapan asesmen yang



dilakukan guru pada pembelajaran bahasa Indonesia. Metode deskriptif bertujuan memaparkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang kerangka berpikir. Hasil deskripsi dipergunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada simpulan.

### Data dan Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang disediakan oleh alam, yang harus dicari atau dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti (Subroto, 1992). Pada dasarnya data adalah bahan jadi penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti, bukanlah bahan mentah penelitian (Sudaryanto, 1990/1993). Data penelitian berupa kalimat pertanyaan pemahaman yang digunakan dalam tugas autentik atau paparan bahasa (teks tertulis) dari deskripsi asesmen autentik pada pembelajaran bahasa Indonesia SMA. Penelitian ini menggunakan 35 tugas autentik bahasa Indonesia dari tujuh buku teks siswa SMA sebagai sumber data.

**Tabel 3**  
**Persebaran Data Penelitian pada Buku Teks**

No.	Judul Buku Teks Siswa	Kelas/ Semester	Jumlah	Penamaan Autentik	Tugas
1.	<i>Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA dan MA</i> oleh: Alex Suryanto dan Agus Haryanta 2007 Jakarta Esis	X/1-2 KTSP	5	(1) Geladi Diri, (2) Geladi Kelompok, (3) Uji Kompetensi 1, (4) Uji Teori, dan (5) Asah Kata	
2.	<i>Bahasa Indonesiaku Bahasa Negeriku untuk SMA dan MA Program IPA/IPS</i> oleh: Atep Tatang dkk. 2012 Solo Platinum	XI/1-2 KTSP	7	(1) Aktivitas 3, (2) Tugas Mandiri, (3) Lacak Informasi, (4) Tugas Kelompok, (5) Refleksi, (6) Evaluasi, (7) Lebih Kreatif Berlatih	
3.	<i>Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA/MA</i> oleh: Engkos Kosasih 2006 Jakarta Erlangga	XII/1-2 KTSP	10	(1) Latihan, (2) Studi Lapangan, (3) Apersepsi, (4) Studi Pustaka, (5) Tes Kognitif, (6) Refleksi Diri, (7) Telusur Makna, (8) Uji Kompetensi (9) Kegiatan, dan (10) Lintas Akademika	
4.	<i>Bahasa Indonesia Kebanggaan Bangsaaku untuk SMA dan MA Program Wajib</i> oleh: Trisni Sulistyowati dan Anang Krisdayanto 2013 Solo Platinum	X/1 – 2 Kurikulum 2013	2	(1) Latihan dan (2) Tugas	



No.	Judul Buku Teks Siswa	Kelas/ Semester	Jumlah	Penamaan Autentik	Tugas
5.	<i>Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik SMA/MA/SMK/MAK</i> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 Jakarta Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.	XI/1 Kurikulum 2013	2	Tugas	
6.	<i>Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik SMA/MA/SMK/MAK</i> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 Jakarta Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.	XI/2 Kurikulum 2013	2	Tugas	
7.	<i>Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA/MA Kelas Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya</i> oleh: Yadi Mulyadi dan Ani Andriyani 2015 Bandung Yrama Widya	XII/1-2 Kurikulum 2013	7	(1) Kegiatan Siswa 1: Penguatan Konsep, (2) Kegiatan Siswa 10: Penugasan, (3) Refleksi, (4) Kegiatan Siswa 6: Eksplorasi Konsep, (5) Kegiatan Siswa 14: Diskusi Kelompok, (6) Tugas Proyek, dan (7) Tugas Portofolio	

### Metode Pengumpulan Data

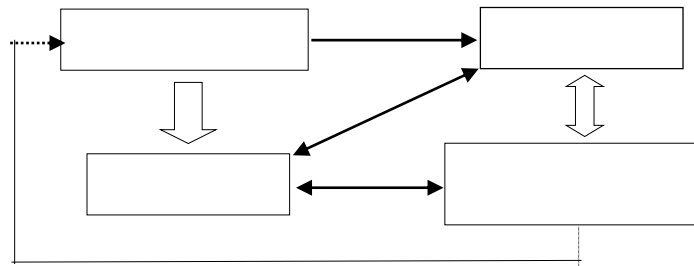
Pengumpulan data dilakukan dengan cara kaji pustaka, pendapat pakar, evaluasi, dan analisis dokumen pembelajaran bahasa Indonesia. Pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, baca, dan catat (Sugiyono, 2012). Teknik pustaka mempergunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data (Subroto, 1992/2007). Teknik baca dilakukan dengan membaca kritis dan teliti untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif (Subroto, 1992). Teknik terakhir, yaitu teknik catat dilakukan dengan pencatatan terhadap data yang sesuai dengan sasaran dan tujuan penelitian (Subroto, 2007). Berbagai jenis tugas autentik dalam buku teks diberikan penamaan yang menarik agar menarik minat siswa dengan penyesuaian proses penyelesaian tugas tersebut. Tugas-tugas tersebut dikumpulkan dan dilakukan proses analisis.

### Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data menurut Miles & Huberman, yaitu analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara simultan dilakukan



bersamaan dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2015).

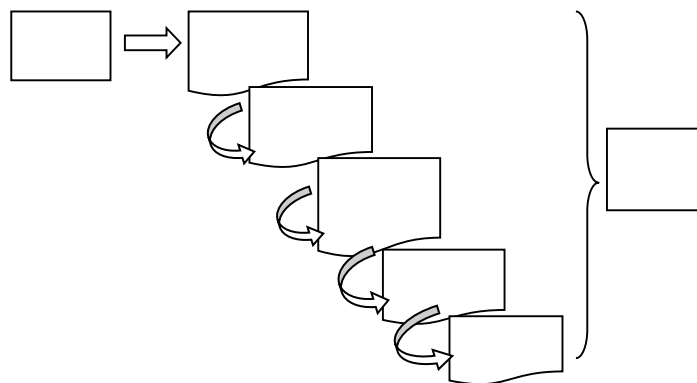


**Gambar 3**  
**Teknik Analisis Data Model Interaktif**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles dan Huberman dalam Sangadji dan Sopiah, 2010). Data penelitian ini dituliskan dengan cara mengorganisasikan hasil reduksi kemudian disusun secara naratif sehingga dapat memberikan kemungkinan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan terhadap data yang telah diorganisasi dalam bentuk narasi, grafik, atau tabel. Simpulan-simpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung (Basrowi dan Suwandi, 2008; Emzir, 2010). Kegiatan penarikan simpulan mencakup proses analisis esensial yang didasarkan atas pengorganisasian informasi yang diperoleh dalam analisis data, kemudian dilakukan penafsiran intelektual terhadap simpulan-simpulan yang diperoleh dari pencarian arti dan makna data serta memberi penjelasan.

#### **Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data penelitian yang dilakukan meliputi pengecekan sejawat, kecukupan referensi yang relevan, konsultasi dosen pembimbing, teknik triangulasi sumber, dan ketekunan atau keajekan pengamatan.



**Gambar 4**  
**Pemeriksaan Keabsahan Data**

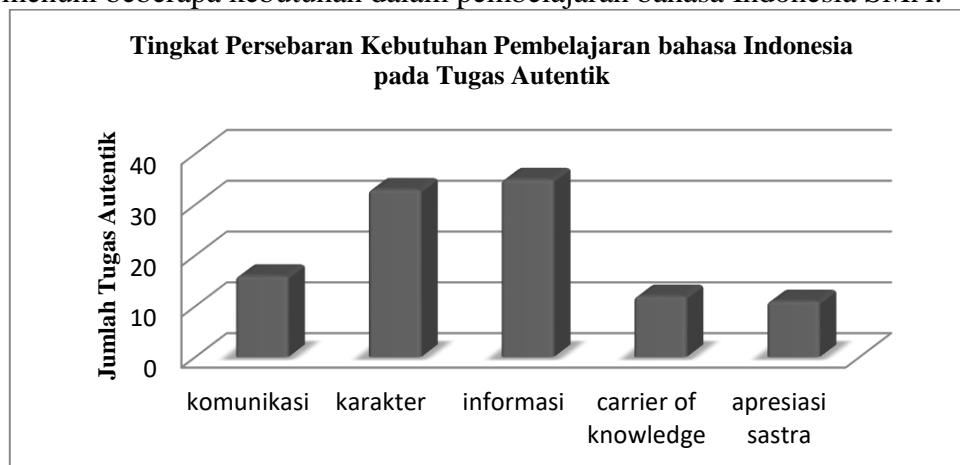
Pengecekan teman sejawat dilaksanakan dengan diskusi kelompok terpumpun (FGD, *Focus Group Discussion*). Diskusi dengan sejawat memberikan kesempatan awal untuk menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran

peneliti (Moleong, 2014). Pengecekan teman sejawat dapat disebut *member checking* (Emzir, 2010). Pengamatan dilakukan untuk memeriksa secara berulang bahwa data itu merupakan tugas autentik. Mengulang kembali analisis data berdasarkan klasifikasi kebutuhan penelitian, yaitu menjawab rumusan masalah. Mengulang kembali analisis data ini, merupakan proses tindakan untuk mereviu hasil tulisan sehingga tingkat keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan (Emzir, 2010).

## PEMBAHASAN

### Asesmen Autentik Berdasarkan Kebutuhan Domain Pembelajaran Bahasa Indonesia

Berdasarkan landasan teori, kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia ada lima, yaitu (1) kebutuhan komunikasi, (2) kebutuhan karakter, (3) kebutuhan informasi, (4) kebutuhan pembawa ilmu lain, dan (5) kebutuhan apresiasi sastra. Data tugas autentik yang didapatkan dari berbagai buku teks yang digunakan berjumlah 35 dan telah dianalisis berdasarkan lima kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia. Setiap tugas autentik tidak hanya memenuhi satu kebutuhan, tetapi memenuhi beberapa kebutuhan dalam pembelajaran bahasa Indonesia SMA.



Gambar 5

### Tingkat Persebaran Kebutuhan Pembelajaran Bahasa Indonesia Berdasarkan Kajian Domain

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan informasi terdapat pada semua tugas autentik dengan jumlah data 35, kemudian kebutuhan karakter terdapat pada 33 data. Adapun kebutuhan komunikasi terdapat pada 16 data tugas autentik, kebutuhan pembawa ilmu terdapat pada 12 tugas autentik dan kebutuhan apresiasi sastra terdapat pada 11 data tugas autentik. Tidak semua data tugas autentik memenuhi lima kebutuhan aspek pembelajaran sekaligus. Ada tugas autentik yang hanya terpenuhi beberapa aspek kebutuhan pembelajaran. Guru harus memperhatikan terpenuhinya semua aspek kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia. Jika pada satu tugas autentik aspek kebutuhannya belum terpenuhi, tugas autentik lain diberikan untuk dapat melengkapi kekurangannya.

### Asesmen Autentik Berdasarkan Kebutuhan Capaian Belajar Menurut Jenjang Kelas



Asesmen autentik berdasarkan kebutuhan capaian belajar di kelas X, XI, dan XII terletak pada capaian KD pada setiap kelas dengan membuat tugas autentik pada KD tersebut.

**Tabel 4**  
**Persebaran Capaian Materi untuk KD Kelas X**

No.	KTSP 2006	Kurikulum 2013	Peminatan Kurikulum 2013
1.	Berita	Teks anekdot	Berita
2.	Cerita pendek	Teks laporan hasil observasi	Cerita hikayat
3.	Diskusi	Teks prosedur kompleks	Naskah Sastra Melayu Klasik
4.	Teks nonsastra	Teks negosiasi	Teks naratif
5.	Paragraf naratif, deskriptif, dan ekspositif		Teks ekspositoris
6.	Puisi		Puisi
7.	Membaca memindai		Proses morfologis
8.	Cerita rakyat		Konstruksi frasa
9.	Memberikan tanggapan		
10.	Sastra Melayu Klasik		
11.	Paragraf argumentatif dan paragraf persuasif		
12.	Teks pidato		
13.	Wawancara		
14.	Menceritakan pengalaman		

**Tabel 5**  
**Persebaran Capaian Materi untuk KD Kelas XI**

No.	KTSP 2006	Kurikulum 2013	Peminatan Kurikulum 2013
1.	Sambutan dan wawancara	Teks cerita pendek	Biografi tokoh
2.	Membaca intensif dan membaca nyaring	Teks pantun	Cerita pendek
3.	Proposal	Teks cerita ulang biografi	Cerita fiksi dalam novel
4.	Surat dagang	Teks eksplanasi kompleks	Artikel
5.	Karangan ilmiah	Teks film/drama	Drama



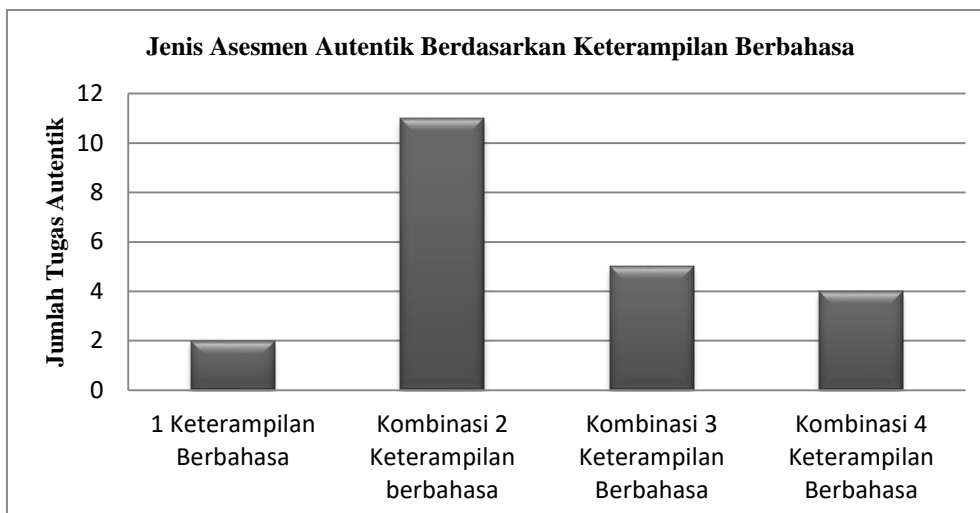
No.	KTSP 2006	Kurikulum 2013	Peminatan Kurikulum 2013
6.	Drama		Awalan, akhiran, dan konfiks
7.	Novel		Kata majemuk
8.	Resensi		Klausa dan kalimat
9.	Notulen rapat		
10.	Biografi		
11.	Paragraf deduktif dan induktif		

**Tabel 6**  
**Persebaran Capaian Materi untuk KD Kelas XII**

No.	KTSP 2006	Kurikulum 2013	Peminatan Kurikulum 2013
1.	Artikel	Teks cerita sejarah	Laporan kegiatan
2.	Teks pidato	Teks berita	Puisi terjemahan
3.	Surat dinas	Teks iklan	Makalah
4.	Novel	Teks opini/editorial	Teks aksara Arab-Melayu
5.	Puisi	Teks cerita fiksi dalam novel	Teks pidato
6.	Resensi buku		Kohesi dan koherensi paragraf
7.	Karangan berpola		Makna konotatif dan denotatif
8.	Kritik dan esai		Drama
9.	Fakta dan opini		
10.	Laporan lisan		
11.	Ide pokok		
12.	Gurindam		
13.	Paragraf deduksi dan induksi		

### **Asesmen Autentik Berdasarkan Keterampilan Berbahasa**

Laporan hasil belajar siswa SMA sesuai dengan KTSP 2006 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan asesmen berdasarkan keterampilan berbahasa. Asesmen keterampilan yang dimaksud terdiri atas asesmen keterampilan mendengarkan, asesmen keterampilan berbicara, asesmen keterampilan membaca, dan asesmen keterampilan menulis. Tugas autentik yang melibatkan lebih dari satu keterampilan berbahasa membuat tugas autentik tersebut makin kompleks untuk diselesaikan siswa. Guru dapat mengefektifkan waktu KBM untuk memberikan asesmen empat keterampilan berbahasa sekaligus pada satu tugas autentik.

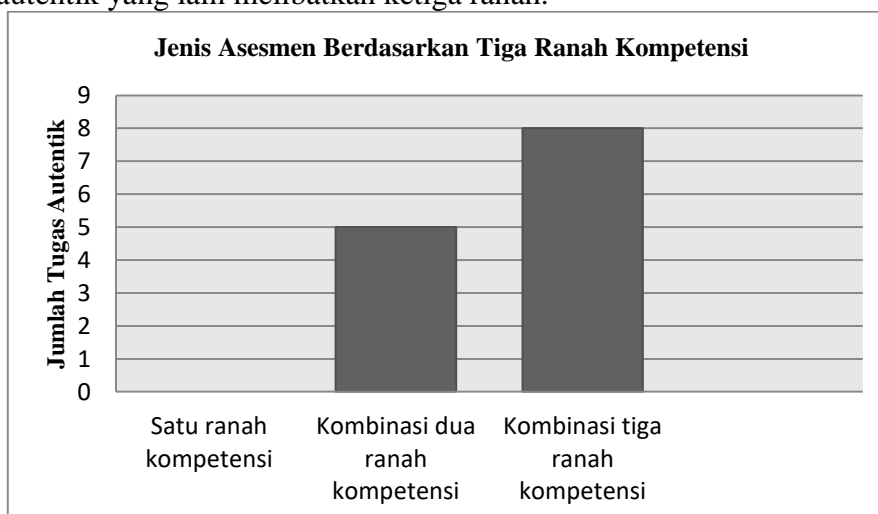


**Gambar 6**  
**Jenis Asesmen Autentik Berdasarkan Keterampilan Berbahasa**

Gambar diagram di atas menjelaskan bahwa dari 22 data tugas autentik asesmen satu keterampilan berbahasa berjumlah dua data, asesmen kombinasi dua keterampilan berbahasa berjumlah 11 data, asesmen kombinasi tiga keterampilan berbahasa berjumlah 5 data, dan asesmen kombinasi empat keterampilan berbahasa berjumlah 4 data.

### Asesmen Autentik Berdasarkan Tiga Ranah Kompetensi

Asesmen pembelajaran bahasa Indonesia yang dibutuhkan untuk Kurikulum 2013 didasarkan atas tiga ranah kompetensi, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Tiga ranah kompetensi yang dinilai mencerminkan Kompetensi Inti (KI) yang digunakan pada pembelajaran Kurikulum 2013. Tugas autentik sebagai data penelitian menunjukkan bahwa setiap data tidak hanya memberikan satu ranah kompetensi, tetapi melibatkan ranah yang lain. Hasil penelitian atas 13 data tugas autentik pada buku teks siswa Kurikulum 2013 yang melibatkan dua ranah kompetensi berjumlah 5 data, sedangkan 8 data tugas autentik yang lain melibatkan ketiga ranah.



**Gambar 7 Jenis Asesmen Berdasarkan Tiga Ranah Kompetensi**



## **Relevansi Asesmen Autentik dengan Kebutuhan Pembelajaran Bahasa Indonesia**

Asesmen autentik pada buku teks siswa bahasa Indonesia ditunjukkan dengan adanya tugas-tugas autentik pada setiap tema materi yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Asesmen autentik pada buku teks tersebut mempunyai relevansi dengan kebutuhan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia sesuai dengan KTSP 2006 atau Kurikulum 2013. Tugas autentik sebagai asesmen pada buku teks membantu tercapainya kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia. Kebutuhan domain pembelajaran bahasa Indonesia meliputi (1) kebutuhan komunikasi, (2) kebutuhan karakter, (3) kebutuhan informasi, (4) kebutuhan penghele ilmu, dan (5) kebutuhan apresiasi sastra. Jadi, tugas autentik yang memenuhi lima analisis kebutuhan pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan KD pembelajaran yang dimaksud. Adapun tugas autentik yang belum memenuhi kelima aspek analisis kebutuhan dapat dilengkapi oleh guru dengan menambahkan tugas autentik kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya.

## **PENUTUP**

Hasil dari penelitian ini, antara lain: (1) deskripsi penggunaan asesmen autentik pada buku teks siswa berdasarkan analisis kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia SMA, yaitu analisis kebutuhan domain pembelajaran bahasa Indonesia yang, antara lain, komunikasi, karakter, informasi, penghele ilmu, dan apresiasi sastra dan analisis kebutuhan capaian belajar bahasa Indonesia setiap kelas; (2) klasifikasi jenis-jenis asesmen autentik pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan keterampilan berbahasa, antara lain, asesmen keterampilan mendengarkan, asesmen keterampilan berbicara, asesmen keterampilan membaca, dan asesmen keterampilan menulis; (3) klasifikasi jenis asesmen autentik pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan tiga ranah asesmen, yaitu asesmen kompetensi sikap, asesmen kompetensi pengetahuan, dan asesmen kompetensi keterampilan; dan (4) relevansi asesmen autentik pada buku teks siswa SMA dengan kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan KTSP 2006 dan Kurikulum 2013. Selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah dan menjadi bahan masukan agar lebih memperdalam kajian asesmen setiap mata pelajaran tertentu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Basuki, Ismet dan Hariyanto. (2015). *Asesmen Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Baswori dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Inayatillah, Fafi. (Tanpa Tahun).”Telaah Materi Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013”. *Makalah Pendamping Pembelajaran dan Kurikulum Musyawarah dan Seminar Nasional III AJPBSI*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret [http://bastind.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/2.Setting\\_AJPBSI\\_Pembelajaran-Kurikulum.pdf](http://bastind.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/2.Setting_AJPBSI_Pembelajaran-Kurikulum.pdf)



- (diakses 14 Mei 2017, Pukul 08.35 WIB).
- Kemendikbud. (2014c). *Pedoman Guru Mata Pelajaran Kurikulum 2013 untuk SMA dan SMK*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <http://puskurbuk.kemendikbud.go.id>.
- (2014d). *Buku Guru Edisi Revisi 2014: Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Kurikulum 2013*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. [http://bsd.pendidikan.id/data/2013/kelas\\_10sma/guru/Kelas\\_10\\_SMA\\_Bahasa\\_Indonesia\\_Guru.pdf](http://bsd.pendidikan.id/data/2013/kelas_10sma/guru/Kelas_10_SMA_Bahasa_Indonesia_Guru.pdf). (diakses 9 Januari 2017, Pukul 16.00 WIB).
- Kusumaningsih, Dewi. (2015). “Peran Teks Bahasa Indonesia sebagai Penghela Ilmu Pengetahuan dalam Kurikulum 2013 (Strategi Mengenal Struktur Teks dalam Buku Bahasa Indonesia SMA Kelas X)”. *Prosiding Konferensi Nasional Bahasa dan Sastra III*, 30—31 Oktober 2015. Halaman 404—407. Surakarta: Program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mansyur, Harun Rasyid, dan Suratno. (2015). *Asesmen Pembelajaran di Sekolah: Panduan bagi Guru dan Calon Guru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ngadip. (Tanpa Tahun). “Konsep dan Jenis Penilaian Autentik (*Authentic Assesment*)”. *E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya*. Volume 1. ISSN: 2337-3253. Hal. 1—13. [https://dispendik.surabaya.go.id/surabayabelajar/jurnal/199/Jurnal\\_10.pdf](https://dispendik.surabaya.go.id/surabayabelajar/jurnal/199/Jurnal_10.pdf)(di akses 19 Mei 2017, pukul 23.41 WIB).
- Nurhayati. (Tanpa Tahun). *Pengembangan Silabus Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Sekolah Menengah Pertama di Kota Palembang (Development of Instructional Indonesian Syllabus for Junior High School Level in Palembang City)*. [http://eprints.unsri.ac.id/437/1/PENGEMBANGAN\\_SILABUS\\_PEMBELAJARAN\\_BAHASA\\_INDONESIA\\_UNTUK\\_SEKOLAH\\_MENENGAH\\_PERTAMA\\_DI\\_KOTA\\_PALEMBANG.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/437/1/PENGEMBANGAN_SILABUS_PEMBELAJARAN_BAHASA_INDONESIA_UNTUK_SEKOLAH_MENENGAH_PERTAMA_DI_KOTA_PALEMBANG.pdf). (diakses 14 Mei 2017, Pukul 20.10 WIB).
- Nurgiyantoro, Burhan. (2015). *Penilaian Otentik dalam Pembelajaran Bahasa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sani, Ridwan Abdullah. (2016). *Penilaian Autentik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Subroto, Edi D. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: UNS Press.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS, UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press).
- Sudaryanto. (1990). “Data dalam Penelitian Kebahasaan secara Linguis, Pokok-pokok Pikiran”. *Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra*. Malang: HISKI dan Yayasan Asih Asah Asuh (YA3).
- \_\_\_\_\_. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.



- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistyowati, Dyah. (2015). "Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah dan Perguruan Tinggi". *Prosiding Konferensi Nasional Bahasa dan Sastra III*, 30—31 Oktober 2015. Hal. 22—35. Surakarta: Program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Suwandi, Sarwidji. (2015). "Meneguhkan Paradigma Mutu Pembelajaran Bahasa Indonesia". *Prosiding Konferensi Nasional Bahasa dan Sastra III*, 30—31 Oktober 2015. Halaman 22—35. Surakarta: Program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Swandono. (1997). *Pendidikan Bahasa Indonesia*. Surakarta: Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis Bandung dan Puslitbangjari Lemlit Universitas Sebelas Maret.
- Tarigan, Henry Guntur. (2008a). *Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.
- \_\_\_\_\_. (2008b). *Menulis sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.
- Yulmiati. (2014). "Analisis Kebutuhan Terhadap Pengembangan Instrumen Penilaian Otentik". *Jurnal Pelangi Research of Education and Development*. Vol. 7 No. 1 Desember 2014 Halaman: 31—37.  
<http://id.portalgaruda.org/?ref=search&mod=document&select=title&q=penilaian+otentik&button=Search+Document>. (diakses 6 Desember 2016, Pukul 17.09 WIB).





**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 1 Kelompok 2**

Pembicara : Murtiana Nainggolan, Benedictus Sudyana, dan Yohanes Sugiyanto  
Judul Makalah : “Asesmen Autentik Pembelajaran Bahasa Indonesia SMA: Pemanfaatan Instrumen Berdasarkan Analisis Kebutuhan”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 08.00—09.30  
Moderator : Dr. Fairul Zabadi  
Pencatat : 1. Dewi Khairiah  
2. Nadia Almira Sagitta

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Lima kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia: komunikasi, karakter, informasi, penghela ilmu, dan apresiasi sastra.
2. SMAN 1 Muter memulai pembelajaran dengan kelas daring.
3. Kebutuhan komunikasi tidak hanya seputar lisan saja, tetapi juga teks tertulis. Misalnya, komunikasi antara siswa dan guru.
4. Kebutuhan karakter: asesmen autentik disesuaikan dengan tingkat kompetensi siswa di bidang kognitif dan keterampilan berbahasanya.
5. Kebutuhan informasi: anak tidak bisa kita pisahkan dari gawainya karena kita membelajarkan bahasa ke generasi digital. Maka dari itu, kita harus mengikuti perkembangan zaman yang mereka alami.
6. Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu lainnya. Teks dalam bidang apa pun menggunakan bahasa Indonesia sebagai medianya. Misalnya, pelajaran mengenai teks observasi menggunakan teks bertema satelit.
7. Kebutuhan apresiasi sastra juga harus diperhatikan.
8. Instrumen penelitian ini adalah tugas autentik yang bersumber dari tujuh buku teks.
9. Dahulu banyak tugas dari guru yang merupakan tugas tertulis, tetapi dalam metode autentik tugas yang banyak diberikan adalah tugas berbasis proyek demi menerapkan kebutuhan komunikasi dan karakter siswa.
10. Sebaiknya tugas yang diberikan memenuhi empat ranah keterampilan berbahasa: mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca agar waktu guru menjadi lebih efektif.
11. Kebutuhan domain pemelajar bahasa Indonesia meliputi afektif, kognitif, dan psikomotorik.
12. Simpulan: mendeskripsikan penggunaan asesmen autentik pada buku teks berdasarkan kebutuhan pemelajar bahasa Indonesia, klasifikasi analisis domain kebutuhan (dan analisis capaian belajar), keterampilan, dan sikap.
13. Berdasarkan KTSP 2006, terapkan kurikulum secara konsisten dan berkelanjutan agar sesuai dengan kompetensi setiap individu.
14. Bahasa Indonesia jangan sampai hanya dipakai saat komunikasi, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan domain pembelajaran bahasa Indonesia.



## **Tanya Jawab**

### **Penanya 1**

Nama : Rosendri  
Instansi : Yogyakarta

#### **Pertanyaan:**

Bagaimana tolok ukur penilaian autentik Kurikulum 2013?

#### **Jawaban:**

Saya menggunakan buku acuan Burhan Nurgiyantoro. Hal yang dinilai dalam penelitian autentik adalah aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif. Rubrik autentik dibuat dengan menggunakan rubrik tabel yang tersedia di buku Burhan Nurgiyantoro. Inti penilaian autentik adalah unjuk kerja.

### **Penanya 2**

Nama : Munirah  
Instansi : Universitas Muhammadiyah Makasar

#### **Pertanyaan:**

Bagaimana mengintegrasikan pembelajaran daring dengan ketiga ranah?

#### **Jawaban:**

Tidak hanya dalam kelas daring, tetapi juga dalam kelas tatap muka. Kelas daring hanya penambahan saja. Padukan antara kelas daring dan kelas sesungguhnya. Kelas daring membantu proses pembelajaran, misalnya, saat guru tidak hadir di sekolah, guru masih bisa mengondisikan siswa yang berada di sekolah.

### **Penanya 3**

Nama : Seni Asniyati  
Instansi : SMPN 231 Jakarta

#### **Pertanyaan:**

Ketika memulai asesmen pada anak, kemampuan anak menganalisis teks rendah, sementara instrumen yang kita gunakan untuk penilaian autentik bersumber dari buku. Apakah penelitian Ibu memiliki trik untuk memudahkan anak?

#### **Jawaban:**

Anak-anak sekarang lebih mudah mencerna melalui video. Tampilkan video animasi saat mengajar atau mendongeng.

### **Penanya 4**

Nama : Edi Sukardi  
Instansi : HPBI (Himpunan Pembina Bahasa Indonesia)

#### **Pertanyaan:**

Bagaimana melakukan penilaian apresiasi puisi sehingga gagasan penyair sampai kepada pembacanya?

**Jawaban:**

Terapan yang paling mudah mempraktikkan langsung di kelas. Berkaitan dengan puisi, siswa kita arahkan untuk membacakan teks puisi yang tidak kita tentukan. Guru dapat menilai alasan siswa memilih puisi ini lalu buat rubrik apresiasi sastranya.

**Penanya 5**

Nama : Ratnasari Dewi  
Instansi : Tapanuli Utara

**Pertanyaan:**

Apakah kebutuhan karakter dalam hal menulis? Apakah anak-anak tidak lagi dibimbing guru-guru sebab urutan menulis abjadnya salah. Apa ini salah guru? Seharusnya cara menulis abjad dan angka harus baik karena ini dasar agar tulisan mereka bagus.

**Jawaban:**

Arahkan pendidikan di luar kelas, anak mudah melihat sesuatu kemudian mempraktikkan. Gunakan metode di luar kelas lalu berikan tugas autentik karya sastra agar anak lebih jujur membawakan kondisi nyatanya dalam teks yang ditulisnya.

**Isu-Isu Penting:**

1. Proses pembelajaran teks tidak terlihat di dalam buku siswa sehingga harapan siswa dapat menulis itu agak susah.
2. Penerapan literasi dengan memperhatikan jenis teks. Jenis-jenis teks ini akan memudahkan anak dalam memahami teks sebab teks ini ada di soal-soal PISA.
3. Desain RPP dapat mengintegrasikan teks.
4. Jika guru-guru dapat mengidentifikasi teks, siswa akan mudah menghadapi teks.
5. Pengajaran berbasis teks selalu ada keterampilan berbahasa, misalnya, mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis sehingga langkah-langkah pembelajaran tidak bisa sama, bergantung pada keterampilan yang diminta.



## 8. Apresiasi Kebinekaan melalui Pembelajaran Penggunaan Ujaran Toleran (*Verbal Tolerance*) pada Siswa Usia Dini

### APRESIASI KEBINEKAAN MELALUI PEMBELAJARAN PENGGUNAAN UJARAN TOLERAN PADA SISWA USIA DINI *Diversity Appreciation through Learning by Using Verbal Tolerance for Preschool-Aged-Students*

**Nuraini Fatimah**

Universitas Muhammadiyah Surakarta  
nuraini.pbsidums@gmail.com

#### **Abstrak**

Tujuan penulisan ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk intoleransi verbal yang diucapkan siswa usia dini di Raudhatul Athfal (RA) Bakti XV Surakarta beserta konteks situasi yang melatarbelakanginya, (2) mendeskripsikan cara guru mengembangkan apresiasi kebinekaan melalui pengembangan pembelajaran ujaran toleran atau toleransi verbal pada siswa usia dini di RA Bakti XV Surakarta. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian ini adalah data intoleransi verbal dari siswa, toleransi verbal yang diajarkan guru, dan konteks situasi yang melatarbelakangi ujaran. Sumber data penelitian ini adalah (1) informan, yakni guru, siswa, dan orang tua siswa; (2) peristiwa, berupa konteks situasi pemicu munculnya intoleransi verbal dan proses pembelajaran pengembangan apresiasi kebinekaan melalui penggunaan ujaran toleran atau toleransi verbal; dan (3) dokumen. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis data penelitian menggunakan metode interaktif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan hal berikut ini. Pertama, bentuk intoleransi verbal yang diucapkan siswa RA Bakti XV Surakarta berupa *verbal bullying* dan ujaran kebencian yang berkaitan dengan warna kulit, disabilitas, penampilan fisik, kemampuan kognitif, serta cara beribadah. Konteks situasi yang melatarbelakangi munculnya ujaran intoleran adalah pada saat bermain, pada saat pembelajaran klasikal, dan saat praktik beribadah. Kedua, guru RA Bakti XV Surakarta berupaya menanamkan rasa ketunggalikaan dengan mengajak siswa saling menyayangi dengan menyanyikan lagu yang liriknya menunjukkan rasa sayang kepada semua orang dan menunjukkan bahwa semua makhluk sama di mata Tuhan, memberikan ucapan selamat dan memuji setiap hasil pekerjaan teman, serta saling mengingatkan saat ada teman yang menghina perbedaan cara beribadah teman lain.

**Kata-kata kunci:** apresiasi, kebinekaan, intoleransi verbal, toleransi verbal

#### **Abstract**

*The purposes of the paper are to describe 1) the forms of verbal intolerance uttered by the preschool-aged-students at RA Bakti XV Surakarta along with the context of the background situation and (2) the way teachers develop appreciation through a learning development by using tolerant speech or verbal tolerance in the preschool-aged-students of RA Bakti XV Surakarta. The research is a descriptive qualitative research. The data are the verbal intolerance, verbal tolerance, and the context of the background situation. The data sources include 1) the informants are the*



*teachers, students, and parents of students, (2) events, and 3) documents. The techniques of the data collection is the in-depth interview, event observation, and document analysis. The data is analysed using the interactive method in descriptive form. The results show that (1) the forms of the verbal intolerance uttered by the students of RA Bakti Surakarta students covered the verbal bullying and hate speech related to skin color, disability, physical appearance, cognitive abilities, and ways of worship. The contexts of the situation where the intolerant speech uttered are during play time, during classical learning, and when practicing worship; (2) the RA Bakti Surakarta teachers try to develop senses of unity by inviting students to love each other by singing songs that express their affection for everyone and show that all beings are equal in front of God, say congratulations and praise every work of friends, and remind each other when there was a friend who insulted the different ways of worshipping.*

**Keywords:** *appreciation, diversity in unity, verbal intolerance, verbal tolerance*

## **PENDAHULUAN**

Manusia dilahirkan dalam kondisi yang beragam sehingga muncullah perbedaan antara manusia satu dan yang lain. Keberagaman manusia tersebut sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menyatukan mereka dan membuat mereka saling mengenali satu sama lain.

Keberagaman disebut juga dengan kebinekaan. Kebinekaan tidak hanya menyangkut perbedaan agama, tetapi lebih luas dari itu, yakni perbedaan etnis, warna kulit, kondisi fisik, tingkat kognitif, cara pandang, dan sebagainya. Meskipun isu mengenai konflik perbedaan didominasi oleh perbedaan agama, sangat banyak konflik perbedaan yang disebabkan oleh keberagaman, misalnya, keberagaman fisik (warna kulit, tinggi badan, disabilitas), kekurangmampuan kognitif, perbedaan tingkat ekonomi, perbedaan kebiasaan atau perilaku, dan perbedaan budaya. Keberagaman ini merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Slogan *Bhinneka Tunggal Ika* sampai saat ini menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Bahkan, Indonesia menjadi contoh bagi dunia dan mereka mengapresiasi kebinekaannya.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, *apresiasi* dinyatakan sebagai pengamatan, penilaian, atau penghargaan terhadap hal tertentu. Adapun *kebinekaan* adalah kata lain dari *keberagaman*. Apresiasi kebinekaan merupakan penghargaan terhadap keberagaman tersebut. Sebagai bangsa yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, masyarakat Indonesia harus terus melakukan upaya peningkatan apresiasi terhadap kebinekaan.

Akan tetapi, berdasarkan pandangan yang sempit, kadang-kadang keberagaman dan perbedaan justru dianggap sebagai pemicu ketidakharmonisan, terutama bagi mereka yang tidak menerapkan sikap toleran. “Masalah terbesar di dunia saat ini adalah intoleransi,” ungkap salah satu tokoh Kerajaan Inggris, Putri Diana. Hal itu dibuktikan dengan penelitian terbaru para ahli yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak-anak melakukan *bullying (verbal bullying)* (Nasution & Hasibuan: 2015).

Intoleransi saat ini makin banyak muncul, terutama karena dukungan teknologi informasi yang tanpa batas. Wujud intoleransi yang berupa tindakan kekerasan sangat tampak dan mudah dikenali dan dapat diproses secara hukum. Akan tetapi, intoleransi yang berupa tindakan verbal sangat sulit diproses secara hukum. Bentuk



intoleransi verbal kadang seolah-olah tidak menunjukkan kekerasan atau kebencian, misalnya, ucapan (1) “Kamu cantik lho kalau pakai jilbab!” atau (2) “Kok kamu pakai jilbab terus, apa tidak gerah?” Bentuk bahasa verbal (1) tersebut mungkin dapat dimaknai sebagai pujian terhadap lawan bicara. Akan tetapi, jika ujaran tersebut disampaikan kepada nonmuslim, hal itu dapat menyinggung lawan bicara karena pujian tersebut menyangkut prinsip dan pilihan seseorang.

Tindakan intoleransi verbal makin hari makin tinggi intensitasnya. Beberapa peristiwa intoleransi verbal tampak dalam berbagai berita peristiwa intoleransi verbal yang dilontarkan seseorang atau institusi tertentu yang menyinggung perbedaan. Bahkan, intoleransi verbal tersebut terdapat dalam karya seni berbahasa dan dipublikasikan kepada masyarakat luas.

Indonesia baru saja dihebohkan dengan syair puisi yang bahasanya menyinggung kebudayaan tertentu dan perilaku agama tertentu. Bahkan, beberapa kasus intoleransi verbal berupa ujaran kebencian tengah diproses secara hukum. Ungkapan tersebut banyak yang berisikan kata-kata kasar atau jelas menunjuk pada etnis, komunitas, atau penganut agama tertentu.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi berbagai tindakan intoleransi verbal. Di berbagai belahan dunia, hal tersebut juga terjadi dan terus berlangsung. *Kumparan News* (2018) memberitakan adanya produk iklan pakaian ternama asal Swedia, HnM, yang menampilkan seorang anak laki-laki berkulit hitam sedang mengenakan jaket bertuliskan *coolest Monkey in the jungle* yang berarti ‘monyet paling keren di hutan’.

Sebuah iklan perusahaan coklat di Jerman pada Mei 2018 dianggap rasis karena menyinggung warna kulit salah satu figur publik Kerajaan Inggris. Iklan itu menggambarkan kartun produk coklat berbaju pengantin putih dan ditayangkan saat pernikahan Pangeran Harry dan Meghan. Iklan itu dilengkapi frasa “Busa putih” dan tajuk yang bertuliskan “Apa yang Anda lihat? Bukankah Anda juga ingin menjadi Meghan hari ini?” Hal itu dianggap rasis karena kenyataannya Meghan adalah keturunan Afrika-Amerika. Apalagi awalnya varian coklat yang diiklankan tersebut bernama Negerkuss (‘ciuman Negro’) sebelum diubah menjadi Schokokuss (‘ciuman coklat’) (Liputan6.com, 2018). Iklan lain yang juga dianggap diskriminatif adalah iklan produk perawatan kulit dari Jerman, Nivea. Iklan salah satu produk itu menggunakan slogan “Putih adalah kemurnian.” (*BBC News Indonesia*, 2017).

*Merdeka.com* (2016) juga merilis berita tentang iklan pil pencerah kulit di Thailand yang mengusung slogan “Putih membuat Anda jadi pemenang.” Pada iklan itu sang model iklan menyatakan bahwa kesuksesan karirnya sangat bergantung pada kulit putih. Iklan itu disertai dengan gambar seseorang yang seluruh tubuhnya hitam disandingkan dengan model yang kulitnya putih.

Di Malaysia beberapa waktu lalu muncul sebuah iklan yang dianggap mendiskriminasi orang Indonesia dan jenis pekerjaan tertentu. Iklan sebuah produk *vacuum cleaner* itu dilengkapi kalimat “*Fire your Indonesia Maid now!*” yang artinya ‘Pecat pembantu Indonesiamu sekarang!’.

Dunia olah raga yang terkenal dengan sportivitasnya pun tidak luput dari kemunculan intoleransi verbal. Di dunia olah raga sepak bola sering terjadi diskriminasi, baik oleh penonton, pemain, maupun pelatih. Mario Balotelli yang terkenal dengan julukan *Super Mario* menjadi sasaran olok-olok bersifat rasis di mana pun dia bermain. Hal itu terjadi karena ia seorang pemain berkulit hitam.



Bentuk intoleransi sering muncul di sekolah-sekolah yang notabene merupakan tempat pendidikan. Bentuk intoleransi tersebut berupa *bullying*, baik fisik maupun verbal. Hal ini dibuktikan dari hasil uji bentuk-bentuk perilaku *school bullying* terhadap remaja di Amerika oleh Wang dkk. Dari semua remaja Amerika, korban *bullying* paling banyak mendapatkan perlakuan *bullying* secara verbal, yakni mencapai 53,6% dari seluruh remaja korban *bullying*. Yang lainnya mendapatkan *bullying* secara fisik, sosial, dan elektronik. Meskipun para pelaku intoleransi verbal tersebut telah meminta maaf, hal itu akan terus membekas. Apalagi jika intoleransi verbal tersebut dilakukan dalam bentuk ujaran kebencian atau *verbal bullying* yang mungkin akan menimbulkan trauma yang dalam dan mengganggu kesehatan psikologis korbannya.

Dalam hal menjaga perilaku berbahasa, di Indonesia ada peribahasa yang bermakna menjaga diri dalam perilaku verbal, misalnya, “mulutmu harimaumu” yang artinya kita harus senantiasa menjaga lisan kita karena segala perkataan dan ucapan apabila tidak dipikirkan lebih dahulu dapat merugikan diri sendiri. Selain itu, Indonesia telah merilis produk-produk hukum yang melindungi kebinekaan atau keberagaman dan perbedaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.

Sebagai undang-undang yang mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berisi larangan dan sanksi pidana bagi seseorang yang menyebarkan informasi yang dimungkinkan dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Pengaturan pelarangan penyebaran ujaran kebencian telah diatur dalam beberapa undang-undang. Sementara itu, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis. Nasution dan Hasibuan (2015) serta Zakiyah dkk. (2017) menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya gejala intoleransi verbal atau *verbal bullying* bisa datang dari individu, keluarga, kelompok bermain, maupun lingkungan komunitas pelaku dan media sosial. Oleh karena itu, peran lingkungan dalam mencegah dan meminimalisasi timbulnya intoleransi verbal sangat diperlukan.

Sufanti dkk. (2015) mengemukakan hasil survei persepsi guru tentang pentingnya pendidikan toleransi di sekolah. Salah satu nilai karakter yang sebaiknya dan perlu ditanamkan serta dibiasakan kepada siswa adalah toleransi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan Kemendikbud (2010, hlm. 9) yang menyebutkan bahwa toleransi merupakan salah satu dari delapan belas nilai karakter bangsa yang harus dimiliki oleh para siswa. Toleransi penting ditanamkan di sekolah. Kemendikbud (2010, hlm. 9) merumuskan bahwa nilai toleransi adalah “sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya”. Dalam menghadapi peranannya di masyarakat, siswa dipersiapkan oleh sekolah, selain oleh keluarga atau masyarakat sekitarnya. Sekolah memiliki peran sebagai agen sosialisasi setelah keluarga.

Pembelajaran karakter toleransi harus diterapkan sejak dini karena anak usia dini merupakan investasi masa depan, baik bagi keluarga maupun lebih luas lagi bagi nusa dan bangsa (Nasution, 2017). Segala hal yang diterima anak pada usia dini tersebut mampu bertahan lama dan membekas sangat kuat. Kesalahan cara dan pola mendidik mereka akan berakibat fatal karena dapat memberikan efek negatif



jangka panjang yang sulit diperbaiki (Suyanto, 2005, hlm. 2). Jika mereka mengalami *verbal bullying*, tentu saja dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial anak usia dini tersebut, baik di sekolah maupun di lingkungannya.

Urgensi penelitian ini tampak pada pemertabatan bangsa Indonesia melalui pemantapan positivisme penggunaan bahasa. Pembelajaran toleransi verbal melalui penggunaan ujaran toleran pada siswa usia dini di sekolah akan berdampak sangat baik dalam pengembangan apresiasi terhadap kebinekaan sekaligus menjaga kebinekaan sebagai kekuatan bangsa Indonesia.

Tujuan penulisan ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk intoleransi verbal yang diujarkan siswa usia dini di RA Bakti XV Surakarta beserta konteks situasi yang melatarbelakanginya; dan (2) mendeskripsikan cara guru mengembangkan apresiasi kebinekaan melalui pengembangan pembelajaran dengan menggunakan ujaran toleran atau toleransi verbal pada siswa usia dini di RA Bakti XV Surakarta.

## LANDASAN TEORI

KBBI memuat istilah *toleransi*. Menurut KBBI, *toleransi* bermakna ‘sifat atau sikap toleran’, yaitu bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sementara itu, senada dengan penjelasan dalam KBBI, dalam *Webster’s World Dictionary of American Language* dijelaskan bahwa kata *toleransi* secara etimologis berasal dari bahasa Latin *tolerare* yang dapat diartikan sebagai ‘menahan, menanggung, membetahkan, membiarkan, dan tabah’. Dalam bahasa Inggris, kata *tolerare* itu berubah menjadi *tolerance* yang diartikan sebagai ‘sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan’ (Bahari, 2010: 50).

Pengertian *toleransi* dikemukakan oleh J. P. Chaplin (dalam Bahari, 2010: 51), yaitu satu sikap liberalis atau tidak bersedia campur tangan serta ketidakmauan seseorang mengganggu tingkah laku dan/atau keyakinan yang dimiliki orang lain. Sementara itu, yang dimaksud dengan toleransi mensyaratkan adanya penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan, keyakinan, nilai, serta praktik orang atau kelompok lainnya.

Intoleransi verbal merupakan bentuk ketidaktoleranan melalui ujaran atau bahasa verbal. Intoleransi verbal tidak semata berbentuk perkataan atau ucapan yang menghina atau mencemooh. Pujian yang menyinggung ras atau mencampuri kepercayaan seseorang dapat pula dikategorikan sebagai intoleransi verbal. Hal ini berpijak dari pengertian toleransi sebagai sikap membiarkan, mengakui, menahan, dan membolehkan serta ikhlas dalam menerima berbagai perbedaan.

Intoleransi verbal berarti ketidakmampuan menahan dan membiarkan secara verbal perbedaan dan pilihan orang lain. Tidak disebutkan bahwa intoleransi hanya berwujud kekerasan verbal yang berwujud cemoohan atau ejekan dan hinaan. *Verbal bullying* sebagai bentuk intoleransi verbal dapat juga terjadi dalam bentuk pelecehan verbal (sindiran, makian, penghinaan, atau cacian) yang diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu (Black dan Jackson dalam Margaretha, 2010: 57).

Intoleransi didasarkan pada rasa takut. *Bullying* adalah gejala intoleransi yang meningkat dan menjadi lingkaran setan (McDowell, 2017). Anak-anak diganggu





karena mereka berbeda, anak-anak diganggu karena sejumlah alasan. "Perbedaan" menarik perhatian negatif, misalnya, memiliki penampilan atau ukuran tubuh yang tidak biasa, menunjukkan perilaku gangguan *attention-deficit/hyperactive disorder* (ADHD), menampilkan tingkat kecemasan atau rasa takut yang sangat tinggi, memiliki ketidakmampuan belajar, atau memiliki kondisi medis yang memengaruhi penampilan, atau karena ukuran tubuh yang gemuk, kulit yang hitam, rambut yang keriting, atau pun albino.

*Bullying* secara verbal dapat dimaknai sebagai segala bentuk tingkah laku atau perilaku yang mengandalkan pemakaian bahasa, ujaran, atau kata-kata untuk menyerang orang lain. Ejekan, panggilan dengan sebutan tertentu, ancaman, penyebaran berita rahasia korban, dan perkataan yang memalukan tergolong aksi verbal (Sucipto, 2012). Contoh *bullying* verbal, antara lain, menghina, mengejek, mencemooh, menyindir, atau mengintimidasi seseorang. *Bullying* verbal merupakan jenis yang paling umum terjadi. Intoleransi verbal berbentuk *verbal bullying* dapat dilakukan dengan bantuan media elektronik (disebut *cyberbullying*), misalnya, dengan mengirimkan pesan yang kasar atau komentar yang ofensif.

Intoleransi verbal tersebut dapat terjadi di berbagai kalangan, bahkan di lingkungan pendidikan anak usia dini telah muncul beberapa perilaku verbal *bullying*. Oleh karena itu, pembelajaran pengenalan ujaran toleran harus sudah diajarkan sejak pendidikan anak usia dini (PAUD).

Di Indonesia, PAUD adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Rentang usia tersebut menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini menjadi pendidikan yang penting bagi seorang anak. Hal itu berkaitan dengan masa pertumbuhan dan perkembangan otak anak yang sudah mencapai 80% pada usia 6 tahun (Nasution, 2017).

Berk (dalam Sujiono, 2013: 6) menambahkan sebuah penjelasan bahwa berdasarkan rentang usianya, anak usia dini merupakan sosok individu yang sedang menjalani proses perkembangan yang pesat untuk keberlangsungan kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentang usia 0--8 tahun.

Dalam rentang perkembangan hidup manusia, anak usia dini mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Perkembangan tersebut terjadi dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, bentuk perlakuan proses pembelajar yang diberikan kepada anak seharusnya memperhatikan karakteristik tahapan perkembangan anak sesuai dengan usianya.

Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan anak usia dini sebagaimana tertulis pada UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi "pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar". Hal tersebut dipertegas pada Bab I Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah sebuah upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun (Depdiknas, USPN, 2004: 4).

Menurut Putri (2016), pada tahap usia dini, anak sangat mudah menyerap segala pengetahuan, baik yang berhubungan dengan kekerasan maupun hal-hal yang lain. Penerimaan lingkungan serta pengalaman positif selama melakukan aktivitas sosial yang dipupuk pada masa kanak-kanak akan mereka petik hasilnya pada masa dewasa (Nasution, 2017).



## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di RA Bakti XV Kota Surakarta pada semester gasal tahun pelajaran 2017/2018. Informan terdiri atas empat orang guru dan tiga puluh orang siswa. Masalah yang diamati lebih difokuskan pada ujaran-ujaran intoleransi verbal yang diucapkan siswa usia dini dan toleransi verbal yang diajarkan oleh guru di RA Bakti XV serta konteks situasi pemicu munculnya ujaran intoleransi verbal.

Sumber data penelitian terdiri atas (1) informan, yakni guru, siswa, dan orang tua siswa; (2) peristiwa, berupa konteks situasi yang memicu munculnya ujaran intoleran dan proses pembelajaran penggunaan ujaran toleran atau toleransi verbal; dan (3) dokumen. Data dalam penelitian ini berupa bahasa verbal serta deskripsi konteks situasi yang melatarbelakanginya. Bahasa verbal berupa ujaran-ujaran intoleran atau intoleransi verbal yang diucapkan siswa usia dini dan ujaran-ujaran toleransi atau toleransi verbal yang diajarkan oleh guru di RA Bakti XV. Data yang berwujud konteks situasi adalah konteks situasi yang melatarbelakangi produksi intoleransi verbal serta konteks situasi yang dibentuk guru dalam mengembangkan toleransi verbal.

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik wawancara diterapkan kepada informan yang meliputi siswa, guru, dan orang tua yang terkait dengan konteks situasi ujaran. Teknik wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi secara jelas mengenai motivasi munculnya intoleransi verbal serta sistem pembelajaran yang menunjukkan penerapan apresiasi kebinekaan. Observasi dilaksanakan pada saat interaksi siswa di sekolah selama jam sekolah berlangsung. Hal ini untuk mengetahui peristiwa nyata atau fakta yang terjadi. Analisis dokumen dilaksanakan terhadap berbagai dokumen pendukung proses pembelajaran, yakni catatan harian sikap dan perilaku siswa di sekolah yang disusun oleh guru. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

RA Bakti XV adalah sekolah pendidikan anak usia dini yang berbasis Islam. Nama lengkapnya adalah Raudhatul Athfal Bakti XV yang beralamat di Jalan Letjend. Sutoyo No. 108, Surakarta. Jumlah siswa pada tahun 2017/2018 mencapai 30 anak. Jumlah guru ada tiga. Selain itu, ada satu orang kepala sekolah. Lingkungan RA berdekatan dengan masjid dan rumah penduduk. Masyarakat di lingkungan masjid memiliki kepercayaan yang beragam (tidak hanya beragama Islam). Oleh karena itu, lingkungan sekolah dapat dikategorikan memiliki beragam kepercayaan.

Selain lingkungan sekolah yang beragam, siswa sekolah ini juga dapat dikategorikan beragam. Sekolah ini tidak termasuk sekolah yang dipersiapkan sebagai sekolah inklusi secara resmi, tetapi memiliki siswa dengan kondisi beragam. Selain siswa yang memiliki tumbuh kembang normal, terdapat siswa disabilitas tunarungu sebagian. Terdapat pula siswa yang mengalami autisme hiperaktif dan keterlambatan pertumbuhan kognitif. Ada pula siswa yang memiliki bentuk badan yang sangat gemuk (obesitas). Kondisi ekonomi serta pendidikan wali siswa pun beragam. Bahkan, wali siswa juga memiliki kepercayaan/agama yang tidak sama.



Berdasarkan pengamatan dan observasi, perilaku intoleransi verbal yang terjadi di sekolah ini dilakukan siswa yang lain dengan spontan atau beralasan. Anak-anak diganggu secara verbal yang disebabkan oleh sejumlah alasan perbedaan. Alasan tersebut meliputi bentuk tubuh yang tidak biasa, ketidakmampuan belajar, perilaku gangguan *attention-deficit /hyperactive disorder* (ADHD), atau kondisi medis yang memengaruhi penampilan.

**Tabel 1**  
**Bentuk-bentuk Intoleransi Verbal yang Sering Terjadi di RA Bakti XV**  
**Surakarta**

No.	Konteks Situasi	Wujud Intoleransi Verbal	Alasan
1	Pada saat bermain ada siswa yang berkulit hitam ikut bermain	- Eh... hitam, jangan dekat-dekat. ( sambil menertawakan) - Ih....ada setan- ada setan	Tindakan spontan berkaitan dengan warna kulit
2	Pada saat bermain dengan siswa disabilitas	- Ok..ok..ok...hua..hua...(menirukan suara siswa yang tunarungu) - Ayo cabut alat kupingnya - Eh <i>bocah ngamuk</i> (terhadap siswa hiperaktif) - Eh, anak gila, anak gila (terhadap siswa autis hiperaktif)	Tindakan untuk mengejek siswa disabilitas
3	Pada saat bermain dengan siswa yang obesitas	- Gendut, he..he..he..(memanggil bukan namanya, sambil menertawakan) - Nah, jatuh pasti kamu yang jatuhin, kan badanmu kaya drum....( sambil menertawakan) - Hey... gajah, gajah, gajah! (sambil menertawakan)	Tindakan mengolok-olok berkaitan dengan penampilan fisik (anak yang obesitas)
4	Pada saat pembelajaran peningkatan kemampuan kognitif berlangsung	- Mesti tidak bisa - Ha...ha..ha...pekak banget - He...mewarnainya kayak <i>peceren</i> (sungai kotor)	Mencela kemampuan kognitif siswa yang mengalami keterlambatan belajar
5	Pada saat pembelajaran salat atau saat bulan Ramadan	- Hey .... tidak puasa, tidak puasa, tidak puasa, malu-maluin. - Eh...itu salatnya nungging... ha..ha..ha...(sambil menertawakan)	Mengolok-olok cara beribadah yang berbeda karena keterbatasannya

Berdasarkan tabel perilaku intoleransi verbal siswa usia dini tersebut dapat dilihat berbagai bentuk intoleransi verbal dan situasi serta alasan pendukung



tindakan tersebut. Bentuk intoleransi verbal yang diujarkan siswa RA Bakti XV Surakarta berupa *verbal bullying* dan ujaran kebencian yang berkaitan dengan warna kulit, penyandang disabilitas, penampilan fisik, kemampuan kognitif, serta cara beribadah. Konteks situasi yang melatarbelakangi munculnya ujaran intoleran adalah saat bermain, saat pembelajaran klasikal, dan saat praktik beribadah.

**Tabel 2**

**Bentuk-bentuk Pembelajaran Ujaran Toleran atau Toleransi Verbal oleh Guru RA Bakti XV Surakarta**

No.	Konteks Situasi	Wujud Pembelajaran Ujaran Toleran/Toleransi Verbal	Deskripsi Tujuan
1	Respons guru pada saat siswa bermain dan terjadi peristiwa intoleransi verbal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengajak siswa menggunakan kata “maaf”, “tolong”, dan “terima kasih” sesuai dengan konteks dan situasi saat intoleransi verbal terjadi.</li><li>- Mengajak siswa menggunakan bahasa tubuh yang menghormati, seperti bersalaman sambil sedikit membungkukkan badan.</li><li>- Mengajak siswa mendengarkan cerita tentang perbuatan baik dan tentang anak soleh.</li><li>- Mengajak siswa menirukan ujaran-ujaran yang lembut dan sopan, penuh rasa sayang, dan pertemanan.</li><li>- Guru juga langsung mengingatkan, melarang, menjelaskan alasan, kemudian mencegah penggunaan intoleransi verbal terhadap siswa lain.</li></ul>	<p>Menghindari penggunaan kata-kata kasar, apalagi dengan motif melecehkan, melemahkan, dan menghina siswa lain.</p> <p>Mengakui kesalahan serta meminta maaf.</p>
2	Pada saat proses pembelajaran berlangsung dan terjadi intoleransi verbal.	<p>Memberikan contoh cara berbicara yang tenang, lembut dan penuh kasih.</p> <p>Mengajarkan minta maaf dan sikap hormat terhadap orang lain.</p>	<p>Membangun kebiasaan memahami dan menerima perbedaan dan kekurangan teman.</p>



No.	Konteks Situasi	Wujud Pembelajaran Ujaran Toleran/Toleransi Verbal	Deskripsi Tujuan
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Guru juga langsung mengingatkan, mencegah, dan menunjukkan bahwa penggunaan intoleransi verbal terhadap siswa lain bukan perbuatan terpuji.</li><li>- Guru mengajarkan dengan sering mengajak siswa menyanyikan lagu “Aku Sayang Ibu” untuk membangun situasi tetap menyenangkan dan mengingatkan siswa tentang kasih sayang pada semua orang.</li></ul>	Mengakui kesalahan serta meminta maaf.
3	Pada saat pembelajaran dan tidak terjadi peristiwa intoleransi verbal.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penggunaan media dan alat peraga boneka yang menarik dan dapat menstimulasi rasa ingin tahu untuk memahami perilaku toleransi verbal. Menirukan ujaran-ujaran toleransi dengan konteks situasi yang dibangun melalui cerita. Misalnya: memanggil teman dengan nama, bukan julukan. Belajar bahasa isyarat kepada teman yang tunarungu.</li><li>- Memberi hadiah kepada siswa yang tidak pernah melakukan intoleransi verbal atau siswa yang telah berubah dan tidak lagi melakukan tindakan intoleransi verbal.</li><li>- Memberikan pemahaman kepada siswa untuk <i>saling mengingatkan saat ada teman yang menghina perbedaan cara beribadah teman yang lain.</i></li></ul>	Melalui kreativitas guru dalam merancang media pembelajaran yang bertujuan mendidik siswa menjadi pribadi yang <i>anti-verbal bullying</i> dan intoleransi verbal umumnya.  Memberikan ruang kepada siswa untuk saling mengoreksi secara santun dan beradab.

Apresiasi terhadap kebinekaan manusia yang hidup saling berdampingan telah berusaha diterapkan oleh guru RA Bakti XV melalui upaya penanaman karakter



toleran berupa kesadaran akan kesamaan atau ketunggalikaan. Guru RA Bakti XV Surakarta berupaya menanamkan rasa ketunggalikaan dengan mengajak siswa saling menyayangi melalui pembelajaran toleransi verbal dengan menyanyikan lagu yang ber lirik ungkapan sayang kepada semua orang dan menunjukkan bahwa semua makhluk sama di mata Tuhan, memberikan ucapan selamat, dan memuji setiap hasil pekerjaan teman, saling mengingatkan ketika ada teman yang menghina teman lain yang berbeda atau memiliki keistimewaan, serta mengajarkan ujaran-ujaran yang menunjukkan rasa memahami penderitaan orang lain melalui teknik bercerita.

Dengan kata lain, guru berupaya memberi contoh kepada siswa dengan menerapkan prinsip toleransi, yakni penerapan prinsip menghormati orang lain, memahami orang lain, menerima keberadaan atau perbedaan dengan orang lain, menghargai perbedaan, dan berempati atau mendalami penderitaan orang lain.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran integratif yang meliputi penerapan ucapan atau kata-kata lembut, tanpa kekerasan, penuh kasih sayang, tindakan saling membantu, atau pun sikap diam untuk memberi kesempatan.

## **PENUTUP**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk intoleransi verbal yang diujarkan siswa RA Bakti XV Surakarta adalah *verbal bullying* dan ujaran kebencian yang berkaitan dengan warna kulit, disabilitas, penampilan fisik, kemampuan kognitif, serta cara beribadah. Konteks situasi yang melatarbelakangi munculnya ujaran intoleran adalah saat bermain, saat pembelajaran klasikal, dan saat praktik beribadah; (2) guru RA Bakti XV Surakarta berupaya menanamkan rasa ketunggalikaan dengan mengajak siswa saling menyayangi dengan menyanyikan lagu yang ber lirik ungkapan sayang pada semua orang dan menunjukkan bahwa semua makhluk sama di mata Tuhan, memberikan ucapan selamat, dan memuji setiap hasil pekerjaan teman, serta saling mengingatkan saat ada teman menghina teman lain berbeda cara beribadahnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahari. (2010). *Toleransi Beragama Mahasiswa (Studi tentang pengaruh kepribadian, keterlibatan organisasi, hasil belajar pendidikan agama, dan lingkungan pendidikan terhadap toleransi mahasiswa berbeda agama pada 7 perguruan tinggi umum negeri)*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- BBC News Indonesia. (6 April 2017). "Dianggap Rasis Nivea tarik iklan deodoran". ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)).
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara.
- Depdiknas. (2004). *Kerangka Dasar Kurikulum*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Putri, D. A. W. M. (2016). Media anti bullying: pembimbingan anak usia dini pada taman kanak-kanak di kota Singaraja *Jurnal Widya Laksana*, 5(1): 29-34.
- Zakiyah, E. Z., Humaedi, Sahadi, & Santoso, M. B. (2017). Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying. *Jurnal Penelitian & PPM*. 4(2):129-389.



- Kumparan News. (15 Januari 2018). “5 Iklan yang dikecam karena dianggap rasis”. Kumparan.com.
- Liputan 6 com.(24 Mei 2018). ”Sebuah iklan cokelat di Jerman dituduh bersikap rasis pada Megahan Markle”.
- McDowell, A. R. (2017). “Understanding intolerance, bullying and suicide”. <https://m.huffingtonpost.ca/adele-mcdowell/intolerance-bullying->
- Merdeka.com. (11 Januari 2016). “Dicap dangkal dan rasis, iklan dari Thailand dihujat netizen”.
- Nasution, Fadhilah Syam. (2017). “Perilaku *bullying* dan sosial anak usia dini “. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*. 1(1): 550-554. <http://semnastafis.unimed.ac.id>.
- Nasution, H. I. S. & Hasibuan, W. F. (2015). Penyebab *Verbal Bullying* di Kalangan Siswa SMP IT Ulil Albab Batam. *Jurnal KOPASTA*, 2 (2), (2015) 111 – 115.
- Sucipto. (2012). Bullying dan upaya meminimalisasikannya: *bullying and efforts to minimize*. *Psikopedagogia*,1 (1):2301-6167.
- Sufanti, Main, dkk. (2015). “Persepsi guru tentang pendidikan toleransi kehidupan beragama di SMA/MA Surakarta”. Dalam *Prosiding University Research Colloquium 2015*.
- Sujiono, Yuliani Nurani & Sujiono, Bambang. (2013). *Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak*. Jakarta: PT Indeks.
- Susanto. (2011). *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Suyanto, Slamet. (2005). *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40. (2008). *Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*.
- Undang-Undang RI Nomor 11. (2008). *Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Nuraini Fatimah  
Judul Makalah : “Apresiasi Kebinekaan melalui Pembelajaran Penggunaan Ujaran Toleran (*Verbal Tolerance*) pada Siswa Usia Dini”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 08.15—09.30  
Moderator : Dr. Sandra Safitri Hanan  
Pencatat : 1. Dina Alfiyanti Fasa  
2. Ibnu Kharish

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Saya ingin menggali bentuk-bentuk toleransi yang diajarkan di lingkungan saya untuk nanti dikembangkan ke lingkungan yang lebih luas.
2. Lingkungan sekolah yang saya amati mungkin tampak homogen, tetapi sebetulnya beragam.
3. Perbedaan dalam pandangan yang sempit berpotensi menumbuhkan sifat rasis atau ketidaktoleranan.
4. Sesuatu yang bersifat toleran harus diajarkan sejak dini karena anak-anak di usia dini dapat merekam dengan kuat sesuatu yang diajarkan kepada mereka.
5. Anak-anak akhir-akhir ini sering terpapar oleh kekerasan. Hal ini mungkin terjadi karena banyaknya berita kekerasan di media massa saat ini.
6. Berdasarkan penelitian, anak-anak saat ini banyak melakukan *verbal bullying*.
7. Kita tidak bisa hanya memberikan sanksi hukum, tetapi kita sudah dapat memulainya melalui pengajaran toleransi untuk anak-anak pada usia dini.
8. Respons guru terhadap kejadian intoleransi adalah memisahkan siswa yang berkonflik, memberikan pembelajaran saat peristiwa intoleransi, dan memberikan pembelajaran di luar peristiwa intoleransi.
9. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengajarkan toleransi adalah kegiatan di lingkungan luar sekolah, *outing*, karnaval, dsb.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Doni Riadi  
Instansi : Sekolah Alam Ar Ridho, Semarang

**Pertanyaan:**

Perkembangan psikologi anak-anak usia dini sudah sangat toleran. Ketika mereka dikumpulkan dan diberikan mainan, mereka akan secara otomatis bergaul. Pada usia berapa anak-anak ini akan diajarkan toleransi? Bagaimana pengajaran kata *toleran* kepada anak-anak karena contoh yang tadi diberikan adalah untuk mengajarkan *intoleran*?





**Jawaban:**

Anak-anak memang tidak diajari kata *toleran*. Anak-anak diajari meminta maaf terlebih dahulu. Pengajaran toleransi dilakukan melalui syair lagu yang mengandung lirik saling menyayangi.

**Penanya 2**

Nama : Edi Suryanto  
Instansi : Universitas Negeri Sebelas Maret

**Pertanyaan:**

Konteks situasi yang Mbak berikan merupakan konteks mikro. Apakah dalam konteks makro bahasa orang tua yang di rumah berpengaruh terhadap bahasa yang dibawa anak ke sekolah? Kaitannya dengan menyanyikan lagu, saya ingin tahu bagaimana peran guru. Apakah mereka melakukan pendekatan pedagogis?

**Jawaban:**

1. Dalam proses penilaian, saya akan meminta tingkat kedalaman tulisan yang berbeda untuk anak SD, SMP, dan SMA.
2. Konteks situasi yang saya sajikan di sini adalah konteks situasi di sekolah. Konteks untuk di rumah baru saya mulai, tetapi datanya belum banyak sehingga masih perlu penelitian lebih lanjut.

**Penanya 3**

Nama : Valentina  
Instansi : Kantor Bahasa NTT

**Pertanyaan:**

Pola pikir dan kepribadian seseorang terbentuk melalui bahasa. Apakah dengan cara yang telah dilakukan guru, seperti yang Ibu contohkan menimbulkan perubahan pada anak-anak tersebut? Ketika ada intoleransi, pasti akan ada efek psikologis terhadap anak yang mengalami perundungan.

**Jawaban:**

Ada hadiah yang diberikan kepada anak-anak yang tidak pernah berlaku tidak baik kepada teman-temannya. Ada juga hadiah untuk anak-anak yang sikapnya berubah terhadap temannya.

**Penanya 4**

Nama : Marnianah  
Instansi : Sekolah Kayakung, Sumatra Selatan

**Pertanyaan:**

*Verbal tolerance* apa yang dimaksud dalam konteks ini? Kemudian, bagaimana hasilnya?

**Jawaban:**

Untuk hasil pembelajaran, ada anak-anak yang berubah sikap terhadap teman-temannya.



**Isu-Isu Penting:**

Pengajaran toleransi harus dimulai pada anak-anak sejak usia dini.



## 9. Penerapan Model Pembelajaran Kenikir untuk Mendongkrak HOTS di SMA Bina Mulia Pontianak 2017/2018

### PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KENIKIR UNTUK MENDONGKRAK HOTS DI SMA BINA MULIA PONTIANAK 2017/2018

**Teddy Fiktorius**

SMA Bina Mulia Pontianak  
fiktoriusteddy@yahoo.com

#### **Abstrak**

Makalah ini merupakan laporan tertulis atas *best practice* yang penulis laksanakan di kelas 11 IPA, SMA Bina Mulia Pontianak, pada tahun pelajaran 2017/2018. Kecenderungan pengajaran bahasa Indonesia yang kurang memperhatikan pengembangan literasi berbasis HOTS memantik penulis merancang dan menerapkan model pembelajaran *Keterampilan Berpikir Kritis dalam Literasi (Kenikir)* sebagai produk inovatif yang bertujuan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik sehingga bertumbuh menjadi lulusan yang kritis dan berdaya saing global. *Kenikir* merupakan model pembelajaran keterampilan menulis bahasa Indonesia berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) yang mengandalkan instruksi dan pertanyaan bermuatan HOTS. *Kenikir* dilaksanakan melalui P4, yakni pembangunan pola pikir kritis, pengembangan pendapat dan alasan, pengembangan keterampilan memecahkan masalah, dan pengembangan keterampilan menulis esai argumentatif. Dalam tahap implementasi, *Kenikir* dilaksanakan berdasarkan P4 dalam dua pertemuan dengan durasi waktu 90 menit per pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 yang meliputi P3 pertama, yakni pembangunan pola pikir kritis, pengembangan pendapat dan alasan, dan pengembangan keterampilan memecahkan masalah. Selanjutnya, pertemuan kedua dilaksanakan pada 18 April 2018 yang mencakup P terakhir, yaitu pengembangan keterampilan menulis esai argumentatif. Pada akhir penerapan, *Kenikir* membawa hasil yang sangat positif terhadap pengembangan HOTS peserta didik sebagaimana terlihat dalam kemampuan peserta didik dalam menunjukkan pola pikir kritis, memberikan pendapat dan alasan yang kritis, analitis, dan kreatif, menunjukkan keterampilan memecahkan masalah, dan mampu menulis esai argumentatif yang merefleksikan keterampilan berpikir kritis.

**Kata-kata kunci:** model pembelajaran *Kenikir*, keterampilan menulis, HOTS

#### **Abstract**

*This paper is a written report of the best practice that the writer held in grade 11 of the natural science program of SMA Bina Mulia Pontianak in the academic year 2017/2018. The tendency of Indonesian language teaching that puts less attention to the development of HOTS-based literacy has induced the writer to design and implement the learning model of Critical Thinking Skill in Literacy or Keterampilan Berpikir Kritis dalam Literasi (Kenikir) as an innovative product that aims to provide the students with a learning experience that enables them to grow into critical and globally competitive graduates. Kenikir is a HOTS-based learning model of the writing skill in the Indonesian language subject that relies on the use of HOTS-based instructions and questions conducted through four key phases,*



*namely the development of critical thinking, the development of giving opinions and reasons, the development of problem-solving skill, and the development of argumentative essay writing skill. In the implementation phase, Kenikir was implemented based on the four key phases in two meetings with a duration of 90 minutes per meeting. The first meeting took place on 16 April 2018 covering the first three phases, namely the development of critical thinking, the development of giving opinions and reasons, and the development of problem-solving skill. Furthermore, the second meeting was held on 18 April 2018 covering the last key phase, namely the development of argumentative essay writing skill. At the end of the implementation, Kenikir brought a very positive result to the students' HOTS development as seen in the students' ability to demonstrate critical thinking, provide critical, analytical, and creative opinions and reasons, demonstrate problem-solving skill, and be able to write an argumentative essay reflecting on critical thinking skill.*

**Keywords:** *Kenikir learning model, writing skill, HOTS*

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Paradigma pendidikan pada abad ke-21 telah mengalami eskalasi penguatan pada keterampilan abad ke-21 yang berorientasi pada *higher-order thinking skills* (HOTS) atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Brookhart (2010) menjelaskan bahwa HOTS mencakup keterampilan mentransfer pengetahuan yang diperoleh di dalam konteks kelas ke kehidupan nyata sehari-hari, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Konsekuensi logis dari pernyataan di atas membawa implikasi terhadap pentingnya upaya guru dalam membentuk peserta didik sebagai lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan mereka secara aplikatif, kritis, dan kreatif sehingga mampu bersaing dalam masyarakat global pada abad ke-21. Pernyataan ini senada dengan konsep kontribusi peserta didik terhadap masyarakat global yang disampaikan oleh Trilling dan Fadel (2009) serta Ontario *Public Service* (2016). Secara rinci, Trilling dan Fadel (2009) menjelaskan bahwa peserta didik pada abad ke-21 dituntut menguasai komunikasi verbal dan nonverbal serta kemampuan berpikir kritis agar dapat bersaing secara global.

Konsekuensi logis akan pentingnya penguasaan komunikasi verbal dan nonverbal serta HOTS memberikan refleksi terhadap mutu pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia di Indonesia. Idealnya, peserta didik perlu dipersiapkan untuk menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing global guna mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Idealisme tersebut senada dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penyiapan sumber daya manusia tersebut menuntut implementasi HOTS dalam setiap kegiatan belajar mengajar (KBM), termasuk KBM bahasa Indonesia. Namun, pada kenyataannya, implementasi HOTS ke dalam KBM bahasa Indonesia masih jauh dari harapan. Kecenderungan pengajaran bahasa Indonesia di satuan pendidikan jenjang menengah atas (SMA) di Indonesia masih mengabaikan eksistensi HOTS.

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan terhadap hasil kuesioner yang diisi pada 2 April 2018 dan wawancara yang dilaksanakan pada 6 April 2018 terhadap guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang tergabung dalam Musyawarah Guru



Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia Kota Pontianak, penulis menarik simpulan bahwa terdapat kekeliruan pada sistem pengajaran bahasa Indonesia. Untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik, pengajaran keterampilan menulis bahasa Indonesia dijadikan studi kasus. Sebanyak 90% responden mengungkapkan kecenderungan teknik mengajar keterampilan menulis mereka hanya bermuatan keterampilan berpikir tingkat rendah (LOTS). Lebih rinci, instruksi pembelajaran keterampilan menulis berbasis pertanyaan LOTS sehingga tidak memungkinkan peserta didik menerapkan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan analitis mereka. Sebagai ilustrasi, instruksi menulis esai berupa “Tulislah sebuah esai mengenai liburan terakhir kalian!” atau pertanyaan berupa “Apa yang kalian lakukan saat liburan yang lalu?” merupakan contoh instruksi dan pertanyaan LOTS yang hanya memungkinkan peserta didik menampilkan keterampilan menulis sebatas merespons tanpa menggunakan keterampilan berpikir kritis. Kecenderungan pengajaran demikian membawa implikasi bahwa pengajaran keterampilan menulis bahasa Indonesia di Kota Pontianak tidak memberi ruang yang cukup bagi pengembangan HOTS peserta didik. Lebih jauh, pengajaran yang berbasis LOTS tersebut berefek pada pembelajaran yang monoton dan membosankan yang pada akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap hasil belajar peserta didik.

Selanjutnya, dalam konteks pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia di tempat kerja penulis, yakni SMA Bina Mulia Pontianak, Kalimantan Barat, penulis (koordinator guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) mengidentifikasi beberapa masalah berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan dengan lebih terperinci. Pengamatan dilaksanakan di kelas 11 IPA pada tahun pelajaran 2017/2018 yang terdiri atas peserta didik yang potensial yang memiliki pencapaian akademis di atas rata-rata kriteria ketuntasan minimal (KKM). Berdasarkan pengamatan, masalah utama berkaitan dengan rendahnya HOTS peserta didik dalam keterampilan menulis bahasa Indonesia yang disebabkan oleh minimnya penerapan model pembelajaran yang mendukung pengembangan HOTS. Selanjutnya, masalah demikian juga berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa peserta didik tersebut memiliki motivasi belajar yang tergolong tinggi, tetapi diasumsikan bahwa motivasi belajar mereka akan jauh lebih bagus jika porsi pengembangan LOTS ditingkatkan mengingat peserta didik akan merasa lebih tertantang untuk berpikir analitis, kreatif, dan kritis.

Masalah-masalah tersebut berimplikasi terhadap pentingnya implementasi model pembelajaran yang berbasis HOTS. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Pujiono (2012), Suhartono (2014), Karakoc (2016), Marfu'i (2016), Saputra (2016), serta Radulovic dan Stancic (2017) yang menyimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis merupakan elemen yang sangat vital dalam setiap bidang pembelajaran. Sementara itu, Halili (2015) serta Ismail, Arshad, dan Abas (2017) menggarisbawahi bahwa keberhasilan penerapan HOTS sangat bergantung pada kepiawaian guru.

Beranjak dari argumentasi di atas, untuk mengatasi masalah tersebut penulis menerapkan model pembelajaran *Keterampilan Berpikir Kritis dalam Literasi (Kenikir)* sebagai upaya menjawab urgensi atas pengembangan HOTS dalam keterampilan menulis bahasa Indonesia. *Kenikir* dikembangkan oleh penulis sebagai produk inovatif yang bertujuan memberikan pengalaman belajar bermakna kepada peserta didik sehingga dapat bertumbuh menjadi lulusan yang kritis dan



berdaya saing global. Lebih spesifik, model pembelajaran *Kenikir* diterapkan pada kelas 11 IPA SMA Bina Mulia Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun pelajaran 2017/2018 untuk mendongkrak HOTS peserta didik dalam keterampilan menulis bahasa Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan beserta aspek yang terlibat dalam penerapan *Kenikir* diuraikan dalam laporan tertulis *best practice* yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran *Kenikir* untuk mendongkrak HOTS di SMA Bina Mulia Pontianak 2017/2018”.

## 2. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang menjadi fokus pelaksanaan dan penulisan laporan *best practice* ini, yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran *Kenikir* untuk mendongkrak HOTS dalam keterampilan menulis bahasa Indonesia pada kelas 11 IPA SMA Bina Mulia Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun pelajaran 2017/2018.

## 3. Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, pelaksanaan *best practice* beserta penulisan laporannya memiliki tujuan mengungkapkan keberhasilan dan aspek-aspek terkait dalam penerapan model pembelajaran *Kenikir* untuk mendongkrak HOTS dalam keterampilan menulis bahasa Indonesia pada kelas 11 IPA SMA Bina Mulia Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun pelajaran 2017/2018. Lebih lanjut, rumusan tujuan ini mengandung variabel masalah berupa HOTS dalam keterampilan menulis peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan variabel tindakan berupa penerapan model pembelajaran *Kenikir*.

## 4. Manfaat

Sejalan dengan tujuan yang dikemukakan di atas, berikut ini adalah manfaat pelaksanaan *best practice* beserta penulisan laporannya yang merefleksikan target yang telah dicapai dalam pengajaran keterampilan menulis bahasa Indonesia berbasis HOTS.

### a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penulisan laporan ini memberikan sumbangan pengetahuan dan melengkapi teori yang telah ada mengenai model pembelajaran yang mendongkrak HOTS dalam keterampilan menulis bahasa Indonesia.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Peserta Didik

Pelaksanaan *best practice* ini membawa dampak positif dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengedepankan HOTS sehingga peserta didik pada akhirnya dapat bertumbuh kembang menjadi lulusan yang kritis, kreatif, dan analitis sehingga mampu bersaing di masyarakat global pada abad ke-21.

#### 2) Bagi Guru

Laporan *best practice* ini menjadi referensi mutakhir bagi guru yang bermaksud meningkatkan HOTS melalui model pembelajaran yang mendukung pengembangan HOTS.



### 3) Bagi Sekolah

Pelaksanaan *best practice* ini diharapkan memberikan manfaat bagi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia yang menjunjung tinggi substansi pengembangan HOTS.

## LANDASAN TEORI

### 1. Kajian Teoretis

#### a. Eksistensi HOTS dalam Pengajaran Keterampilan Menulis Bahasa Indonesia

Transformasi sistem pendidikan pada abad ke-21 yang mengedepankan pengembangan keterampilan abad ke-21 telah mengubah paradigma pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia di Indonesia. Fenomena tersebut mengindikasikan peran vital taksonomi kognitif Bloom yang pada akhirnya direvisi oleh Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001 guna disesuaikan dengan perkembangan zaman (Brookhart, 2010). Lebih terperinci, Brookhart (2010) menerangkan bahwa ranah kognitif tingkat tinggi erat relevansinya dengan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Implikasi dari butir pemikiran tersebut adalah bahwa HOTS melibatkan tiga ranah kognitif teratas dari taksonomi Bloom hasil revisi Anderson dan Krathwohl, yakni menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian, tiga ranah kognitif di bawahnya, yaitu mengingat, memahami, dan mengaplikasi merupakan LOTS.

Selanjutnya, Edberg (2018) menekankan pentingnya peran keterampilan berpikir kritis dalam mengasah keterampilan menulis kreatif. Peran HOTS tersebut selaras dengan penjabaran Trilling dan Fadel (2009) yang menekankan pentingnya desain kegiatan pembelajaran yang mendukung pengembangan HOTS dengan penerapan beberapa ranah kognitif sekaligus dalam sebuah proses belajar mengajar. Penyertaan beberapa ranah kognitif tersebut tidak harus berdasarkan urutan hierarki dari yang terendah ke yang tertinggi, tetapi dapat dikombinasikan tanpa memperhatikan urutan kognitif dalam taksonomi Bloom. Konsekuensi logis atas pernyataan tersebut adalah bahwa model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dituntut menyertakan kombinasi acak dari beberapa ranah kognitif yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang aktif, analitis, dan kreatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Hasil kajian teoretis pada bagian ini berimplikasi pada peran krusial penanaman HOTS pada pengajaran keterampilan menulis bahasa Indonesia. Kecenderungan guru menerapkan model pengajaran yang menginstruksikan peserta didik merespons secara tertulis pertanyaan atau instruksi yang berbasis pada LOTS memerlukan sebuah solusi inovatif. Solusi atas polemik pembelajaran tersebut adalah mengganti peran LOTS dengan HOTS. Dalam konteks *best practice* ini, pengajaran melalui penerapan model pembelajaran *Kenikir* untuk mendongkrak HOTS dalam keterampilan menulis bahasa Indonesia menjadi solusi yang mendesak.

#### b. Pertanyaan Berbasis LOTS versus Pertanyaan Berbasis HOTS

Paradigma pendidikan pada abad ke-21 memiliki alur pemahaman logis sebagai berikut. Pertama, abad ke-21 menyajikan arena internasional bagi kompetisi global yang lebih kompetitif. Selanjutnya, sumber daya manusia yang dapat bertahan dan berpartisipasi aktif dalam kompetisi global tersebut adalah yang



memiliki keterampilan abad ke-21 dan literasi yang kuat. Sebagai konsekuensinya, pendidikan dituntut menyiapkan peserta didik sebagai generasi yang memenuhi kebutuhan global. Lebih lanjut, guru diharapkan menerapkan pengajaran berbasis HOTS. Pada akhirnya, pengajaran berbasis HOTS tersebut memungkinkan penyiapan peserta didik yang kreatif, kritis, dan berdaya saing global pada abad ke-21.

Konsekuensi logis dari alur pemahaman di atas dalam relevansinya dengan variabel *best practice* ini adalah bahwa pengajaran keterampilan menulis bahasa Indonesia memerlukan instruksi pembelajaran yang berbasis HOTS. Instruksi tersebut diterjemahkan sebagai pertanyaan yang bermuatan HOTS. Lee (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan HOTS sangat bergantung pada pertanyaan yang dipakai, yakni pertanyaan yang bermuatan ranah kognitif tingkat tinggi. Lebih terperinci, jenis pertanyaan berbasis HOTS sangat berguna untuk menstimulasi keterampilan berpikir kritis. Sebagai ilustrasi, pertanyaan LOTS “Apa yang Anda lakukan saat liburan yang lalu?” hanya memungkinkan peserta didik menampilkan keterampilan menulis sebatas merespons secara tertulis tanpa menggunakan keterampilan berpikir kritis. Sebaliknya, pertanyaan HOTS “Menurut Anda, mengapa liburan sangat penting bagi kita?” mengharuskan peserta didik mengaplikasikan keterampilan berpikir kritis dalam merespons.

Selanjutnya, elemen teknis mengenai keterampilan menulis bahasa Indonesia perlu diuraikan secara saksama. Elemen teknis berupa pengejaan, tanda baca, diksi, dan tata bahasa dalam keterampilan menulis tidak menjadi poros utama dalam pengembangan HOTS. Yang menjadi fokus esensial dalam pengembangan HOTS adalah kemampuan berargumentasi (Brookhart, 2010). Lebih rinci, Ontario *Public Service* (2016) menekankan ketiadaan jawaban benar tunggal pada pertanyaan HOTS yang berorientasi pada keterampilan berpikir kritis. Sebagai ilustrasi, pertanyaan HOTS berupa “Menurut Anda, mengapa liburan sangat penting bagi kita?” tidak memiliki jawaban absolut, yang berarti bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan yang luas untuk memberikan respons berdasarkan sudut pandang masing-masing dan keterampilan berpikir kritis tertuang dalam jawaban tiap-tiap peserta didik. Sebaliknya, pertanyaan LOTS berupa “Apa yang Anda lakukan saat liburan yang lalu?” memiliki jawaban benar tunggal. Respons peserta didik yang berdasarkan realita pengalaman liburan mereka tidak memberi ruang bagi pengembangan keterampilan berpikir kritis mereka.

Beranjak dari butir pemahaman di atas, hubungan antara jenis pertanyaan dan penerapan HOTS diperjelas oleh Trilling dan Fadel (2009) dengan menerangkan bahwa keterampilan berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dapat secara efektif dikembangkan melalui pembelajaran bermakna yang berlandaskan pada pertanyaan HOTS. Kemudian, Brookhart (2010) dan Hitchcock (2017) menerangkan bahwa pertanyaan HOTS tersebut memungkinkan peserta didik berpikir analitis dalam memberikan argumentasi, melakukan refleksi, dan mengambil keputusan yang kritis. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengajaran berbasis HOTS adalah pengajaran yang mengedepankan penggunaan pertanyaan HOTS.

Akan tetapi, kecenderungan pengajaran bahasa Indonesia mengarah pada kenyamanan guru dalam menggunakan pertanyaan LOTS. Pernyataan ini senada dengan kesimpulan penelitian yang dilaksanakan oleh Lee (2015) yang





menggarisbawahi bahwa guru cenderung menggunakan pertanyaan LOTS karena pertanyaan tersebut lebih mudah dikonstruksi. Sebagai konsekuensinya, peserta didik tidak memperoleh pengalaman belajar yang menerapkan upaya pengembangan HOTS. Pada konteks ini, solusi yang perlu ditempuh adalah berorientasi pada tindakan korektif terhadap guru dengan harapan pertanyaan HOTS dapat lebih banyak digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.

## 2. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan *best practice* ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Pujiono (2012), Suhartono (2014), Halili (2015), Lee (2015), Karakoc (2016), Marfu'i (2016), Saputra (2016), Ismail, Arshad, dan Abas (2017), serta Radulovic dan Stancic (2017). Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan *best practice* ini dari segi variabel masalah yang digunakan, yaitu HOTS. Dalam penelitian mereka, Pujiono, Suhartono, Karakoc, Marfu'i, Saputra, serta Radulovic dan Stancic menyimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis merupakan elemen yang sangat vital dalam setiap bidang pembelajaran. Sementara itu, Halili serta Ismail, Arshad, dan Abas menggarisbawahi bahwa keberhasilan penerapan HOTS sangat bergantung pada kepiawaian guru.

Lebih lanjut, penelitian yang bersinggungan erat dengan substansi penelitian ini, yakni keterampilan menulis adalah penelitian yang dilakukan Pujiono, Suhartono, Lee, dan Saputra. Secara tegas, Lee (2015) menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan HOTS sangat bergantung pada pertanyaan yang dipakai, yakni pertanyaan yang bermuatan ranah kognitif tingkat tinggi.

## STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

### 1. Deskripsi Strategi Pemecahan Masalah

Model pembelajaran *Kenikir* yang dikembangkan dan diterapkan oleh penulis merupakan model pembelajaran keterampilan menulis bahasa Indonesia berbasis HOTS dengan mengandalkan instruksi dan pertanyaan berbasis HOTS. Peserta didik merespons instruksi dan pertanyaan HOTS tersebut secara tertulis dengan menguraikan argumen kritis berdasarkan sudut pandang masing-masing. Spesifikasi model pembelajaran *Kenikir* dijabarkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Spesifikasi Model Pembelajaran *Kenikir***

<b>Spesifikasi</b>	<b>Deskripsi</b>
Nama:	<i>Keterampilan Berpikir Kritis dalam Literasi</i>
Akronim:	<i>Kenikir</i>
Tujuan:	Meningkatkan HOTS peserta didik yang meliputi keterampilan berpikir kritis dalam keterampilan menulis bahasa Indonesia
Konten:	Model pembelajaran yang berbasis instruksi dan pertanyaan HOTS yang terdiri atas 4 kegiatan pembelajaran, yakni: aktivitas 1: pembangunan pola pikir kritis, aktivitas 2: pengembangan pendapat dan alasan, aktivitas 3: pengembangan keterampilan memecahkan masalah, dan aktivitas 4: pengembangan keterampilan menulis esai argumentatif.



- Kegunaan:** Sebagai model pembelajaran keterampilan menulis bahasa Indonesia yang berorientasi pada pengembangan HOTS peserta didik SMA Indonesia
- Perangkat:** Rincian instruksi dan pertanyaan berbasis HOTS
- Basis evaluasi:** Berbasis formatif (bukan sumatif) dengan tujuan memberikan komentar atau umpan balik bersifat konstruktif terhadap keterampilan berpikir kritis berdasarkan rubrik kriteria (lihat Tabel 2).
- Aspek evaluasi:** HOTS dalam keterampilan menulis bahasa Indonesia yang mencakup pola pikir kritis, kemampuan memberikan pendapat dan alasan, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan menulis esai argumentatif.

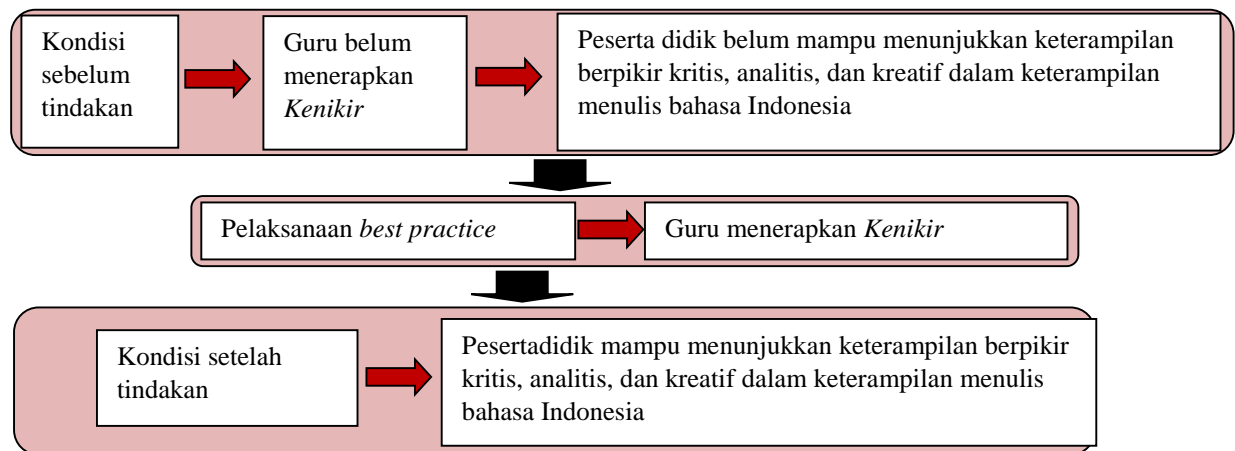
Evaluasi keterampilan berpikir kritis yang berbasis formatif dengan tujuan memberikan komentar atau umpan balik konstruktif dilaksanakan dengan beracuan pada rubrik kriteria yang penulis modifikasi dari rubrik kriteria yang dikembangkan oleh Brookhart (2010) sebagaimana dijabarkan sebagai berikut ini.

**Tabel 2**  
**Rubrik Kriteria Evaluasi Formatif Keterampilan Berpikir Kritis**

<b>Umpan Balik</b>	<b>Bagus</b>	<b>Cukup</b>	<b>Kurang</b>
<b>Kriteria</b>			
Ide Pokok	Ide pokok disampaikan secara jelas, lengkap, dan mampu menjawab pertanyaan, instruksi, atau pokok masalah.	Ide pokok disampaikan secara jelas, tetapi tidak optimal dalam menjawab pertanyaan, instruksi, atau pokok masalah.	Ide pokok disampaikan secara tidak jelas dan tidak menjawab pertanyaan, instruksi, atau pokok masalah.
Pembuktian	Pembuktian diungkapkan dengan akurat, relevan, dan lengkap.	Pembuktian diungkapkan dengan cukup akurat, relevan, dan lengkap.	Pembuktian diungkapkan dengan tidak akurat, tidak relevan, dan tidak lengkap.
Alur Pemikiran	Alur pemikiran dalam memberikan pembuktian berupa alasan pendukung ide pokok disajikan dengan jelas, logis, dan tersusun rapi.	Alur pemikiran dalam memberikan pembuktian berupa alasan pendukung ide pokok disajikan dengan cukup jelas, logis, dan tersusun rapi.	Alur pemikiran dalam memberikan pembuktian berupa alasan pendukung ide pokok disajikan dengan tidak jelas, tidak logis, dan tidak tersusun rapi.

## 2. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penulis dalam pelaksanaan *best practice* digambarkan sebagai berikut.



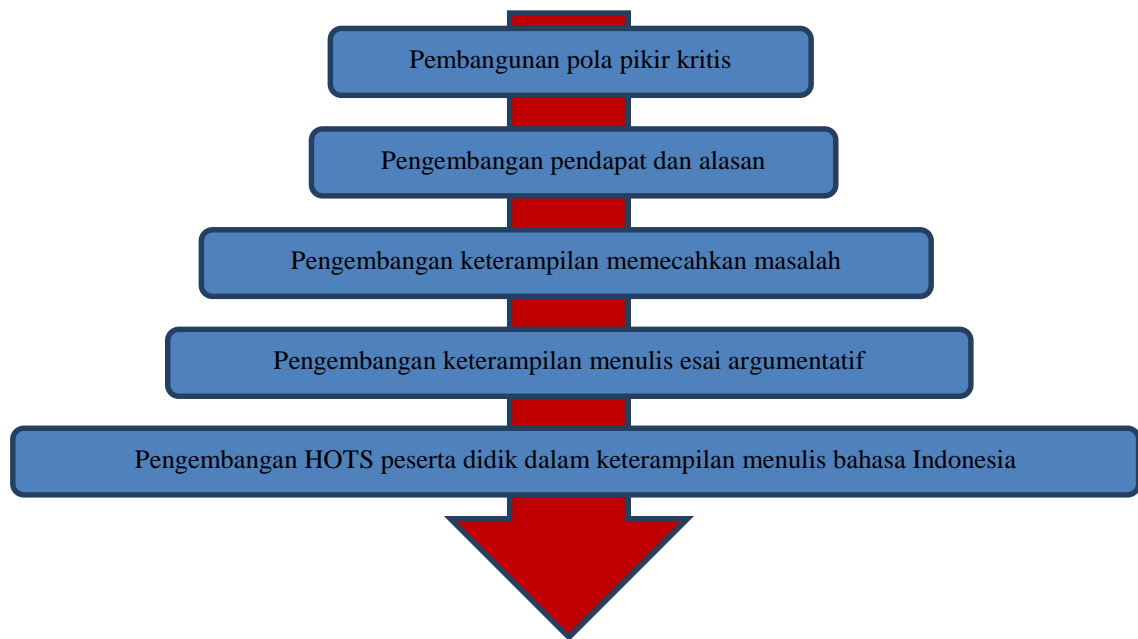
**Gambar 1 Kerangka Berpikir dalam Pelaksanaan *Best Practice***

## 3. Langkah Operasional Pelaksanaan

Model pembelajaran *Kenikir* untuk mendongkrak HOTS peserta didik dalam keterampilan menulis bahasa Indonesia di kelas 11 IPA SMA Bina Mulia pada tahun pelajaran 2017/2018 Pontianak dilaksanakan melalui P4 sebagaimana dijabarkan berikut ini.

- a. **Pembangunan pola pikir kritis**  
Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan menanamkan pola pikir kritis dasar yang melibatkan penggunaan ungkapan *persetujuan*, *penolakan*, dan *penyanggahan*.
- b. **Pengembangan pendapat dan alasan**  
Kegiatan ini bertujuan mengembangkan keterampilan mengungkapkan pendapat dan alasan untuk mendukung sudut pandang melalui penggunaan konjungsi *karena*.
- c. **Pengembangan keterampilan memecahkan masalah**  
Kegiatan ini bertujuan mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dengan menyampaikan beragam strategi pemecahan masalah.
- d. **Pengembangan keterampilan menulis esai argumentatif**  
Kegiatan ini bertujuan mengembangkan keterampilan menganalisis argumen pro dan kontra untuk kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk esai argumentatif.

Alur pengembangan HOTS peserta didik dalam keterampilan menulis bahasa Inggris melalui model pembelajaran *Kenikir* disajikan dalam gambar sebagai berikut.



**Gambar 2**  
**Alur pengembangan HOTS melalui model pembelajaran *Kenikir***

## **PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Strategi**

Model pembelajaran *Kenikir* untuk mendongkrak HOTS peserta didik dalam keterampilan menulis bahasa Indonesia di kelas 11 IPA SMA Bina Mulia Pontianak dilaksanakan berdasarkan P4 dalam dua pertemuan dengan durasi waktu 90 menit per pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 yang meliputi P3 pertama, yakni pembangunan pola pikir kritis, pengembangan pendapat dan alasan, dan pengembangan keterampilan memecahkan masalah. Selanjutnya, pertemuan kedua dilaksanakan pada 18 April 2018 yang mencakup P terakhir, yaitu pengembangan keterampilan menulis esai argumentatif. Penerapan model pembelajaran *Kenikir* melalui P4 dijabarkan sebagai berikut.

#### **a. Pembangunan Pola Pikir Kritis**

Langkah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam tahap pembangunan pola pikir kritis dijabarkan sebagai berikut.

1. Peserta didik ditunjukkan sebuah pernyataan di papan tulis untuk memancing reaksi mereka dalam memberikan pendapat.  
*“Peserta didik wajib menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah.”*
2. Peserta didik diinstruksikan memikirkan respons terhadap pernyataan tersebut berdasarkan pertanyaan: *“Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut?”*
3. Peserta didik ditunjukkan ungkapan-ungkapan yang dapat dipakai untuk merespons pernyataan tersebut. Kemudian, peserta didik diinstruksikan memilih satu di antara ungkapan tersebut yang paling sesuai dengan konteks respons mereka.
  - a. *Saya tidak tertarik dengan topik tersebut.*
  - b. *Saya setuju. Hal demikian memang benar.*



- c. *Saya tidak setuju. Hal tersebut keliru.*
  - d. *Saya tidak yakin.*
  - e. *Saya setuju/tidak setuju karena ....*
  - f. *Saya setuju/tidak setuju karena beberapa alasan, tetapi saya juga membutuhkan beberapa pembuktian lebih lanjut.*
4. Peserta didik ditunjukkan makna ungkapan respons mereka. Guru menjelaskan makna tersebut dalam relevansinya dengan keterampilan berpikir kritis sebagai berikut.
- a. Kepada peserta didik yang memilih ungkapan A dijelaskan bahwa mereka tidak diminta merasa tertarik dengan topik diskusi, tetapi memberikan pendapat terkait topik diskusi.
  - b. Kepada peserta didik yang memilih ungkapan B dan C dijelaskan bahwa mereka menunjukkan pendapat yang kokoh, tetapi diharapkan memberikan alasan atas pendapat tersebut.
  - c. Kepada peserta didik yang memilih ungkapan D dijelaskan bahwa mereka menunjukkan pendapat yang tidak berpendirian kuat sehingga perlu memutuskan satu pendapat pada posisi *menyetujui* atau *menolak*. Mereka diingatkan bahwa keterampilan berpikir kritis perlu terlibat aktif dalam diskusi atau penyampaian pendapat.
  - d. Kepada peserta didik yang memilih ungkapan E dijelaskan bahwa mereka telah menunjukkan keterampilan berpikir kritis dengan baik dengan memberikan alasan atas respons mereka.
  - e. Kepada peserta didik yang memilih ungkapan F dijelaskan bahwa mereka telah menunjukkan keterampilan berpikir kritis dengan sangat baik dengan memberikan alasan atas respons mereka dan meminta informasi tambahan.

#### **b. Pengembangan Pendapat dan Alasan**

Langkah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam tahap pengembangan pendapat dan alasan diuraikan sebagai berikut.

1. Peserta didik disajikan beberapa klausa di papan tulis seperti berikut ini.

<i>Saya berpikir bahwa</i>	<i>merokok harus dilarang di ruang publik</i>	
<i>Saya meyakini bahwa</i>	<i>mengonsumsi buah baik untuk kesehatan</i>	
<i>Saya setuju bahwa</i>	<i>acara TV 'reality shows' adalah rekayasa</i>	
<i>Saya sependapat bahwa</i>	<i>wanita lebih handal dalam berbelanja</i>	<i>karena...</i>
<i>Saya tidak setuju bahwa</i>	<i>kekayaan lebih berharga daripada</i>	
<i>Saya tidak sependapat bahwa</i>	<i>kesehatan</i>	
<i>Saya tidak yakin bahwa</i>	<i>komputer adalah teknologi terandal</i>	
	<i>uang dapat menjamin kebahagiaan</i>	

2. Peserta didik secara berpasangan menghasilkan pendapat disertai alasan dengan menuliskan kalimat yang mereka dapat pilih dari ungkapan di kolom pertama yang dikombinasikan dengan ungkapan pada kolom kedua kemudian dilanjutkan dengan penggunaan konjungsi *karena* untuk menampilkan alasan pendukung.

Berikut adalah contoh respons peserta didik:

- *Saya berpikir bahwa mengonsumsi buah baik untuk kesehatan karena buah-buahan mengandung ragam vitamin yang tubuh butuhkan untuk meningkatkan daya imunitas.*



- *Saya tidak sependapat bahwa kekayaan lebih berharga daripada kesehatan karena kekayaan tidak akan terasa nikmat jika kita dalam keadaan sakit.*

### **c. Pengembangan Keterampilan Memecahkan Masalah**

Langkah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam tahap pengembangan keterampilan memecahkan masalah dijabarkan sebagai berikut.

1. Peserta didik ditunjukkan sebuah kasus masalah untuk dicarikan alternatif solusi.  
*Sujoko dan kawan sekamarnya mengalami sebuah masalah terkait kondisi apartemen mereka. Penghuni di kamar sebelah selalu membuat kegaduhan pada jam malam.*
2. Peserta didik diinstruksikan sebagai berikut.
  - A. *Sebutkan minimal tiga (3) hal yang Sujoko dan kawan sekamarnya dapat lakukan sendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Di antara beberapa solusi tersebut, manakah yang Anda akan rekomendasikan untuk mereka lakukan terlebih dahulu? Uraikan alasannya.*
  - B. *Sebutkan minimal tiga (3) hal yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola apartemen untuk mengatasi masalah tersebut. Di antara beberapa solusi tersebut, manakah yang Anda akan rekomendasikan untuk mereka lakukan terlebih dahulu? Uraikan alasannya.*

### **d. Pengembangan Keterampilan Menulis Esai Argumentatif**

Langkah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam tahap pengembangan keterampilan menulis esai argumentatif diuraikan sebagai berikut.

1. Peserta didik disajikan sebuah pernyataan di papan tulis untuk memancing reaksi mereka dalam memberikan pendapat.  
*“Bahasa Indonesia merupakan kunci pemersatu keberagaman di Indonesia. Apakah Anda sependapat?”*
2. Peserta didik secara berpasangan melakukan *brainstorming* semua alternatif alasan yang mendukung argumen pro atau kontra terhadap pernyataan yang disajikan. Setiap pasangan diinstruksikan menuliskan minimal tiga argumen untuk pro dan kontra.
3. Peserta didik secara mandiri menulis esai argumentatif berdasarkan ide hasil *brainstorming* pada langkah prosedur 2 dengan mengikuti struktur alur esai sebagai berikut.

Paragraf 1: Peserta didik menyinggung ide pokok berdasarkan pernyataan  
*“Bahasa Indonesia merupakan kunci pemersatu keberagaman di Indonesia. Apakah Anda sependapat?”*

Paragraf 2: Peserta didik membahas tiga argumen pro.

Paragraf 3: Peserta didik membahas tiga argumen kontra.

Paragraf 4: Peserta didik menuliskan simpulan.

## **2. Hasil yang Dicapai**

Penerapan model pembelajaran *Kenikir* di kelas 11 IPA SMA Bina Mulia Pontianak tahun pelajaran 2017/2018 yang dilaksanakan berdasarkan P4 dalam dua pertemuan dengan durasi waktu 90 menit per pertemuannya membawa hasil yang sangat positif terhadap pengembangan HOTS peserta didik sebagaimana diuraikan berikut ini.



- a. Peserta didik mampu menunjukkan pola pikir kritis melalui penerapan P pertama, yakni pembangunan pola pikir kritis.
- b. Peserta didik mampu memberikan pendapat dan alasan yang kritis, analitis, dan kreatif melalui penerapan P kedua, yakni pengembangan pendapat dan alasan.
- c. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan memecahkan masalah melalui penerapan P ketiga, yakni pengembangan keterampilan memecahkan masalah.
- d. Peserta didik mampu menulis esai argumentatif yang merefleksikan keterampilan kritis, analitis, dan kreatif melalui penerapan P keempat, yakni pengembangan keterampilan menulis esai argumentatif.

### 3. Kendala-Kendala dan Upaya Perbaikan

Selama penerapan model pembelajaran *Kenikir* di kelas 11 IPA SMA Bina Mulia Pontianak, penulis selaku koordinator guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang menciptakan model pembelajaran tersebut mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut beserta tindakan yang diambil penulis sebagai upaya korektif dijabarkan sebagai berikut.

- a. Kendala utama adalah terkait minimnya pengalaman belajar peserta didik yang berorientasi pada pengembangan HOTS. Sebagai upaya korektif, peserta didik diberikan kesempatan membaca, mencermati, dan memahami contoh esai argumentatif yang disiapkan oleh penulis. Upaya penulis berbuah hasil positif. Tindakan eksploratif tersebut memberikan pemahaman lebih mendalam bagi peserta didik perihal pengembangan HOTS dalam keterampilan menulis bahasa Inggris yang pada akhirnya memberi efek positif terhadap penerapan model pembelajaran *Kenikir*.
- b. Kendala selanjutnya berhubungan dengan motivasi belajar peserta didik. Pada awal penerapan, sebagian peserta didik merasa bahwa pembelajaran berbasis HOTS sulit bagi mereka. Sebagai solusi, penulis memberikan penjelasan lebih lanjut guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran mereka akan pentingnya HOTS sebagai modal mereka dalam menghadapi persaingan global di abad ke-21. Pada akhirnya, muncul pemahaman dan kesadaran di antara peserta didik sehingga mereka memiliki motivasi belajar lebih tinggi.

### 4. Faktor-Faktor Pendukung

Penulis menjabarkan beberapa faktor pendukung implementasi model pembelajaran *Kenikir* untuk mendongkrak HOTS dalam keterampilan menulis bahasa Indonesia sebagai berikut.

- a. Peserta didik kelas 11 IPA SMA Bina Mulia Pontianak memiliki potensi yang besar untuk pengembangan HOTS mengingat data empiris yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata mata pelajaran bahasa Indonesia pada semester ganjil sebelumnya sebesar 85,20 di atas kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang dipatok di SMA Bina Mulia Pontianak, yakni 78,00.
- b. Kebijakan SMA Bina Mulia Pontianak yang memberikan kesempatan luas bagi guru untuk berinovasi dalam pembelajaran menjadi faktor pendukung bagi penulis untuk terus berkarya dalam menghasilkan inovasi pembelajaran yang mendukung pengembangan HOTS.



## 5. Alternatif Pengembangan

Penulis mengemukakan beberapa alternatif pengembangan terkait penerapan model pembelajaran *Kenikir* sebagai berikut.

- a. Model pembelajaran *Kenikir* dapat diterapkan dalam pembelajaran keterampilan berbicara mengingat keterampilan menulis dan berbicara memiliki konsep keterampilan yang sama, yakni ranah keterampilan produktif.
- b. Model pembelajaran *Kenikir* dapat diterapkan juga pada jenjang SD, SMP, SMK dan yang sederajat mengingat landasan teori penerapan model pembelajaran *Kenikir* adalah teori linguistik dan HOTS yang bersifat universal.
- c. Model pembelajaran *Kenikir* dapat diimplementasikan di mata pelajaran bahasa lainnya, yakni Bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya yang dipelajari di satuan pendidikan mengingat landasan teori penerapan model pembelajaran *Kenikir* adalah teori linguistik dan HOTS yang berlaku umum.

## 6. Diseminasi

Penulis melakukan diseminasi *best practice* atas implementasi model pembelajaran *Kenikir* melalui penyebarluasan materi kepada rekan sejawat di SMA Bina Mulia Pontianak dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia Kota Pontianak. Pelaksanaan diseminasi tersebut bertujuan menyebarkan pemahaman atas keefektifan penerapan model pembelajaran *Kenikir*. Kemudian diharapkan timbul kesadaran di antara rekan sejawat akan pentingnya pengembangan HOTS dalam keterampilan menulis bahasa Inggris sehingga pada akhirnya model pembelajaran *Kenikir* dapat diterapkan secara luas. Langkah ini dipandang sebagai upaya konkret yang dapat ditempuh oleh para guru selaku pengajar dan pendidik yang mengemban amanah menyiapkan peserta didik sebagai sumber daya manusia yang berdaya saing global guna mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.

## PENUTUP

Penerapan model pembelajaran *Kenikir* untuk mendongkrak HOTS dalam keterampilan menulis bahasa Indonesia pada kelas 11 IPA SMA Bina Mulia Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun pelajaran 2017/2018 dilaksanakan melalui P4, yakni pembangunan pola pikir kritis, pengembangan pendapat dan alasan, pengembangan keterampilan memecahkan masalah, dan pengembangan keterampilan menulis esai argumentatif. Penerapan model pembelajaran *Kenikir* membawa dampak yang positif terhadap pengembangan HOTS yang ditunjukkan oleh hasil belajar peserta didik berupa kemampuan peserta didik dalam menunjukkan pola pikir kritis, memberikan pendapat dan alasan yang kritis, analitis, dan kreatif, menunjukkan keterampilan memecahkan masalah, serta menulis esai argumentatif yang merefleksikan keterampilan kritis, analitis, dan kreatif.

Penulis memiliki keyakinan yang mendalam bahwa apabila model pembelajaran *Kenikir* diimplementasikan sebagaimana telah direkomendasikan di atas, niscaya satuan pendidikan yang menerapkan model pembelajaran *Kenikir*





dapat merasakan dampak positif dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran bahasa Indonesia yang menjunjung tinggi upaya pengembangan HOTS guna menyiapkan lulusan yang kritis sehingga mampu bersaing dalam masyarakat global pada abad ke-21.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Brookhart, S. M. (2010). *How to assess higher-order thinking skills in your classroom*. Danvers: ASCD.
- Edberg, H. (2018). *Creative writing for critical thinking creating: A discorsal identity*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Halili, S. H. (2015). Effective teaching of higher-order thinking (HOT) in education. *The Online Journal of Distance Education and e-Learning*, 3(2), 41-47.
- Hitchcock, D. (2017). *On reasoning and argument: Essays in informal logic and on critical thinking*. Cham: Springer International Publishing.
- Ismail, R. A. M., Arshad, R., & Abas, Z. (2017). Teacher efficacy: Are they effective in implementing HOTS? *Medwell Journals*, 12(7), 1136-1142.
- Karakoc, M. (2016). The significance of critical thinking ability in terms of education. *International Journal of Humanities and Social Science*, 6(7), 81-84.
- Lee, D. E. (2015). *Using questions to develop students' higher-order thinking skills: A primary English teacher's beliefs and practices*. (Dissertation, University of Hong Kong).
- Marfu'i, L. R. N. (2016). Upaya pendukung pembelajaran literasi dengan mengasah kemampuan berpikir kritis melalui teknik bibliolearning pada siswa. *Jurnal Ilmiah Mitra Swara Ganesha*, 3 (2), 1-18.
- Ontario Public Service. (2016). *21<sup>st</sup> century competencies: Foundation document for discussion*. Ontario: Queen's Printer for Ontario.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Pujiono, S. (2012). Berpikir kritis dalam literasi membaca dan menulis untuk memperkuat jati diri bangsa. *PIBSI*, 778-783.
- Radulovic, L. & Stancic, M. (2017). What is needed to develop critical thinking in schools? *CEPS Journal*, 7(3), 9-25.
- Saputra, D. S. (2016). Pengaruh metode pembelajaran dan berpikir kritis terhadap kemampuan menulis argumentasi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 7(1), 1-12.
- Suhartono (2016). Pengaruh kebiasaan membaca, kemampuan berpikir kritis, dan penguasaan struktur sintaksis terhadap keterampilan menulis ilmiah. *Lentera Pendidikan*, 17(1), 43-65.
- Trilling, B. & Fadel, C. (2009). *21<sup>st</sup> century skills: Learning for life in our times*. San Fransisco: Jossey-Bass.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 1 Kelompok 1**

Pembicara : Teddy Fiktorius  
Judul Makalah : “Penerapan Model Pembelajaran Kenikir untuk Mendongkrak HOTS di SMA Bina Mulia Pontianak 2017/2018”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 08.15—09.30  
Moderator : Dr. Sandra Safitri Hanan  
Pencatat : 1. Dina Alfiyanti Fasa  
2. Ibnu Kharish

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Pembelajaran di abad ke-21 akan sangat berkaitan dengan kata-kata literasi, kemampuan, inovasi, produktivitas, dan pemikiran kritis.
2. Pembelajaran pada masa lalu belum tentu masih dapat diaplikasikan pada masa kini, misalnya, calistung yang dapat dipertanyakan apakah masih dapat diaplikasikan saat ini.
3. HOTS sangat berkaitan dengan keautentikan dan kehidupan sehari-hari.
4. Anak didik dengan metode ini akan disiapkan menghadapi tantangan pada masa kini dan masa depan.
5. Selama ini guru-guru di Pontianak mengandalkan metode LOTS dengan tingkat keterampilan rendah, misalnya, aktivitas untuk menulis pengalaman siswa saat liburan.
6. Kenikir merupakan akronim dari Keterampilan Berpikir Kritis dalam Literasi yang bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis.
7. HOTS meningkatkan kemampuan siswa berargumen. Dalam HOTS tidak ada penilaian dalam bentuk angka, tetapi dalam kelompok penilaian bagus, cukup, atau kurang.
8. Ada empat langkah yang dikembangkan, yaitu pengembangan pola pemikiran kritis, pengembangan pendapat dan alasan, pengembangan keterampilan memecahkan masalah, dan pengembangan keterampilan menulis esai argumentatif.
9. Implementasi dari langkah pertama adalah dengan melemparkan pernyataan “Peserta didik wajib menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah.” Mereka akan dituntut mengungkapkan pendapat mereka. Langkah-langkah berikutnya para peserta didik dapat memberikan argumen untuk pendapat mereka hingga akhirnya mereka dapat menghasilkan tulisan argumentasi berdasarkan pendapat dan alasan mereka.
10. Kenikir dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik, dapat diterapkan di tingkat SD, SMP, SMA sederajat, dan dapat diterapkan di mata pelajaran lain.



## **Tanya Jawab**

### **Penanya 1**

Nama : Doni Riadi  
Instansi : Sekolah Alam Ar Ridho, Semarang

#### **Pertanyaan:**

Menulis untuk saya merupakan sebuah keterampilan tingkat tinggi karena melibatkan kreasi. Ternyata jenis tulisan yang diharapkan untuk dihasilkan adalah tulisan argumentatif. Menulis model apa yang dapat meningkatkan model pemikiran kritis?

#### **Jawaban:**

Sebetulnya pertanyaan yang Bapak gunakan adalah pertanyaan berbasis LOTS. Pertanyaannya hanya apakah jenis tulisan yang dihasilkan. Untuk itu, jawabannya sudah jelas, tulisan argumentatif.

### **Penanya 2**

Nama : Edi Suryanto  
Instansi : Universitas Negeri Sebelas Maret

#### **Pertanyaan:**

Pembelajaran Kenikir diarahkan untuk keterampilan menulis anak SMA. Kemampuan menulis apa yang dituju? Apakah praktik baik yang Bapak tawarkan serupa dengan penelitian tindak kelas (PTK)? Jika serupa dengan PTK, tulisan tersebut adalah data mentah, bukan data matang. Kemudian, jika dikaitkan dengan kemampuan linguistik yang dimiliki oleh anak, pasti akan dipengaruhi oleh kematangan mereka.

#### **Jawaban:**

1. Pergerakan guru terkurung oleh SKKD dan KI-KD. Anak memang hanya menuliskan tulisan argumentatif.
2. Ada beda antara laporan penelitian dan studi kasus. Hal yang saya sampaikan memang studi kasus. Jika diteliti lebih lanjut dengan menggunakan metodologi tertentu, hasilnya akan menjadi sebuah penelitian.

### **Penanya 3**

Nama : Marnianah  
Instansi : Sekolah Kayakung, Sumatra Selatan

#### **Pertanyaan:**

Bagaimana membangun pola pikir guru bahwa metode ini adalah untuk membangun keterampilan HOTS? Bagaimana guru mampu membuat soal HOTS dan siswa mampu menjawab soal HOTS tersebut?

#### **Jawaban:**

Dalam tiga tahun kita mengajarkan anak didik empat keterampilan berbeda, tetapi di tahun terakhir mereka hanya diuji keterampilan membaca. Ada masalah dalam bidang kependidikan kita.



**Isu-Isu Penting:**

Pembelajaran berbasis HOTS dapat membuat peserta didik belajar berpikir kritis.





## **B. SUBTEMA 2: PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK**

### **1. Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik**

Pembicara : Ermaya Suradinata  
Hari, Tanggal : Minggu, 28 Oktober 2018  
Pukul : 17.15—18.00  
Moderator : Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera, Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan.

Yang saya hormati Bapak Doktor Hurip Danu, Kepala Badan Bahasa, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, alhamdulillah sore hari ini, tanggal dua puluh delapan Oktober, hari yang sangat bersejarah. Kesempatan yang sangat bersejarah pada tanggal dua puluh delapan Oktober ini sekaligus membuka kesempatan bagi kita membicarakan bahasa.

Kita ketahui bersama bahwa saat ini penduduk dunia sudah mencapai delapan miliar dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di dalam era globalisasi ini menuntut bangsa di suatu negara kembali kepada jati dirinya. Khususnya dalam hal bangsa kita, paling tidak ada lima dimensi yang perlu kita perhatikan agar kita dapat kembali kepada jati dirinya. Pertama, sejarah bangsa atau negara tidak boleh dilupakan. Dari sanalah kita dipersatukan dan kita bisa berbicara mempersiapkan pergerakan, perjuangan mendirikan bangsa, negara kesatuan republik Indonesia. Oleh para pendahulu kita, semua itu tentu diselenggarakan dengan bahasa Indonesia. Ada pula pemersatu negara kita ini yang tidak dimiliki di dunia ini oleh bangsa dan negara lain, yaitu Pancasila. Saya tidak bermaksud mengupas nilai-nilai yang terkristal dalam Pancasila karena itu membutuhkan waktu yang panjang. Pancasila itu mengandung kata-kata yang diikat, digenggam oleh tangannya, *Bhinneka Tunggal Ika*. Lanjutan daripada *Bhinneka Tunggal Ika* itu adalah *Tanhana Dharma Mangrwa* ‘berbeda-beda, tetapi tetap satu jua’. Berbeda-beda bahasa, tetapi kita bisa bersatu dalam satu bangsa besar yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sungguh sangat amat luar biasa kalau kita mencermati dimensi ideologi.

Ketiga, dimensi humanis, kemanusiaan, memanusiakan manusia dan hubungan antarmanusia. Mau tidak mau, suka tidak suka, komunikasi semua manusia di dunia ini, pasti dibangun dengan bahasa. Keniscayaan yang melekat dalam dimensi kehidupan melalui bahasa di dunia memperlihatkan jati diri suatu bangsa. Juga bangsa kita punya yang namanya bahasa, bahasa negara, bahasa Indonesia.

Keempat, berbicara tentang komitmen, bagaimana kita mempersatukan keberbagaian menjadi satu. Ada komitmen dan integritas sehingga dari integritas ini tumbuh nasionalisme. Nasionalisme mempersatukan kita dengan semangat yang bisa dimengerti melalui bahasa tadi. Kelima, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemarin Menteri Dalam Negeri, Pak Cahyo Kumolo, meminta agar saya hadir dalam acara ini dan saya menyanggupi. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya



menyampaikan salam hormat beliau kepada semua yang hadir. Beliau berhalangan hadir karena ada acara rapat menteri terbatas.

Ibu Bapak sekalian, dalam membangun kehidupan manusia maupun bangsanya, karakter atau jati diri setiap negara tidaklah jadi terlepas. Pada tahun-tahun 1960—1970-an ada guru-guru kita yang dikirim ke Malaysia. Itu bukan keinginan kita, melainkan permintaan Malaysia. Ini merupakan salah satu bentuk untuk menjalin hubungan, karena keamatan, karena kita serumpun dengan Malaysia. Mereka juga menggunakan bahasa yang sebenarnya adalah bahasa yang kita miliki.

Sekarang situasi bahasa di Malaysia sudah begitu berkembang dan di kita komitmen itu tetap ada, yaitu nama jalan semua hampir menggunakan bahasa Indonesia, tetapi di beberapa lokasi ini, Pak, ini yang perlu kita instropeksi, beberapa kompleks, perumahan, itu memakai nama-nama Barat yang tidak jelas juga. Seharusnya memakai nama-nama pahlawan bangsa kita sendiri atau juga yang bisa dimengerti. Nah, dari sana kita ingin berbagi tentang bagaimana bahasa itu sebagai pemersatu, yang dapat mempersatukan kemajemukan bangsa Indonesia. Tahun 1974, saya bukan hanya seorang akademisi, tetapi saya memang lebih banyak praktik di lapangan.

Tahun 1974 saya jadi camat di Boven Digoel, Papua, mungkin ada orang Papua dari sini. Yang terdaftar secara administratif di desa itu atau dusun itu jumlahnya hanya delapan belas, begitu kita turun ke lapangan sejak penjajahan Belanda sudah diketahui di situ ada desa, delapan desa ditemukan. Akses di delapan desa yang ditemukan itu tidak ada sama sekali sehingga sekolah juga tidak ada, bahasanya berbeda-beda. Jadi, hanya bahasa alat pemersatu yang bisa merajut hubungan komunikasi. Nah, kalau tidak ada, komunikasi seperti itu, kita tidak tahu ada kampung di situ. Di Jayapura itu ada namanya Kayu Pulau, Engros, dan Tobati yang letaknya berdekatan, tetapi bahasanya berbeda-beda, Pak. Jadi, begitu kayanya bangsa ini, begitu besar bangsa Indonesia ini, yang sudah diakui oleh negara-negara lain: Australia, Malaysia, India, Filipina, Jepang, Korea, termasuk Malaysia.

Oleh karena itu, momentum pergerakan bahasa yang sekarang, kita rayakan atau kita peringati ini sebenarnya membangkitkan semangat Sumpah Pemuda kita. Jadi, kita lihat Sumpah Pemuda kita ini sudah mengingatkan tentang pentingnya bahasa. Kalau kita lihat di sini ada dua kata bahasa “Satu nusa satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama”. “Satu Nusa Satu Bangsa” ini lagu nasional bangsa Indonesia. Nah, kita lihat sekarang Sumpah Pemuda kita. Sumpah Pemuda kita juga sama, yaitu mempersatukan, “Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Bahasa Indonesia ini sudah ada jauh sebelum pergerakan 1825, 1830, 1908, 1928, dan seterusnya.

Bahkan, perkembangan bahasa Indonesia di Papua itu mungkin lebih dulu dibandingkan dengan di Jawa karena tahun 1818 itu di Manokwari sudah masuk yang namanya agama Katolik, yaitu dengan bahasa Indonesia. Jadi, Papua lebih dulu menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu, kalau kita ke Papua semua pasti tahu bahasa Indonesia, tetapi kalau kita ke Jawa, masih ada kampung yang hanya menggunakan bahasa Jawa. Itu kenyataannya yang masih ada. Kalau ke Papua, kita pasti pakai bahasa Indonesia. Beberapa daerah yang lain keadaannya sama, hanya karena kebetulan saya tinggal selama 21 tahun di Papua, jadi, contohnya Papua. Bapak Ibu sekalian, satu pergerakan yang mungkin bisa kita pelajari adalah peluang yang besar bagi kita, yaitu bagaimana Indonesia ini



berkembang. Kita lihat di sini ASEAN. ASEAN kita lihat ada Indonesia dan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan negara. Ini menunjukkan bahwa apakah karena zaman Sriwijaya pada saat itu, peluang besar bagi bangsa Indonesia sangat memungkinkan untuk melihat penggunaan bahasa Indonesia. Yang kita lihat adalah penggunaan bahasa di ruang publik secara nasional dan internasional sesuai dengan fungsinya sangat diperlukan, untuk apa, untuk bisa kita itu percaya diri terhadap bangsanya. Kalau kita sudah yakin dengan bahasa Indonesia, kita akan percaya diri (*confident*). Sudah ada penataan Undang-Undang 24/2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, bahkan sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri 39/2008 tentang pedoman umum pembakuan nama rupabumi. Saya berpikir, ke depan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud yang memiliki andil besar sekali dan kami berterima kasih mengingatkan bahwa pembangkitan kembali bahasa Indonesia ini untuk membangun piranti komunikasi sosial yang dapat diharapkan, yaitu perlunya gerakan integritas dalam kebinekaan dengan bahasa Indonesia yang berkualitas. Kalau peraturan pemerintahnya sudah ada, perpresnya yang belum ada, mungkin itu yang penting untuk diadakan. Kelak di kemudian hari, khusus untuk bahasa, mungkin perlu adanya undang-undang. Nah, sekarang belum ada sanksi dalam undang-undang tentang bahasa, tetapi kalau untuk bendera dan lambang negara ada sanksinya. Nah, untuk bahasa ini *kok* belum ada sanksinya. Jadi, mungkin perlu diatur dalam perpresnya, perlu ada sanksi bagi mereka yang tidak mau menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, membumikan bahasa Indonesia ini penting sekali. Nah, ini gambaran tentang pentingnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan tetap berpegang pada jati diri bangsa kita sendiri.





**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Gelar Wicara 2**

Pembicara	: Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, S.H., M.S., M.H.
Hari, Tanggal	: Minggu, 28 Oktober 2018
Pukul	: 17.15—18.00
Moderator	: Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.
Pencatat	: 1. Dina Alfiyanti Fasa 2. Septimariani 3. Ibnu Kharish

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Setiap negara memiliki karakter dan jati diri dalam membangun kehidupan manusia dan bangsanya.
2. Penduduk dunia dan perkembangan teknologi menuntut suatu kondisi untuk kembali pada jati dirinya. Contohnya, fakta historis suatu bangsa tidak boleh dilupakan untuk meneguhkan jati diri tersebut. Hal ini untuk mengantarkan masyarakat pada pemahaman bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan oleh para pendahulu, yaitu dengan bahasa Indonesia.
3. Pancasila mengandung ungkapan pemersatu, *Bhinneka Tunggal Ika*, yang menjadi aspek pemersatu bangsa.
4. Komitmen dan integritas diperlukan untuk mempersatukan perbedaan. Nasionalisme tumbuh dari integritas tersebut.
5. Beberapa nama kompleks perumahan menggunakan nama-nama Barat dan ini perlu dikoreksi. Seharusnya penamaan tersebut menggunakan nama-nama pahlawan.
6. Dimensi humanisme itu menghubungkan antara manusia dan manusia. Komunikasinya pasti dilakukan dengan bahasa. Ini juga diperlihatkan dengan adanya bahasa Indonesia.
7. Penggunaan bahasa Indonesia menjadi pemersatu kejemukan masyarakat Indonesia.
8. Sumpah Pemuda mengingatkan kita tentang pentingnya bahasa.
9. Setiap negara memiliki karakter yang tidak dapat dilepaskan dengan hubungan negara serumpun. Pada tahun 70-an, para tenaga pengajar bahasa Indonesia dikirim ke Malaysia.
10. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri bangsa Indonesia.
11. Di Jayapura, Kayu Pulo, Engros, dan Nobati itu berdekatan, tetapi bahasanya berbeda-beda.
12. Di Papua itu bahasa Indonesia sudah lebih dahulu berkembang daripada di Jawa. Itu terjadi sekitar 1918 di Papua.
13. Penggunaan bahasa di ruang publik sangat diperlukan agar masyarakat percaya diri terhadap bangsanya.
14. Peraturan berupa undang-undang untuk bahasa diperlukan untuk mengatur sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan benar di ruang publik.



15. Undang-undang tentang bendera dan lagu kebangsaan sudah ada sanksinya, tetapi undang-undang tentang penggunaan bahasa Indonesia belum terdapat sanksinya.

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Hadi Laksono  
Instansi : Kalimantan Tengah

#### **Pertanyaan:**

Undang-Undang No. 24/2009 memberikan sebuah angin segar terkait dengan perkembangan bahasa Indonesia. Saya setuju dengan Prof., tetapi tidak ada keseimbangan antara keinginan dan kenyataan. Hal ini karena pemangku kepentingan/pejabat tidak mau memberikan dukungan. Misalnya, para pejabat atau pemangku kebijakan masih banyak yang tidak konsisten menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, iklan-iklan di televisi juga menggunakan bahasa asing. Ada ketidakseimbangan antara keinginan dan kepentingan. Bagaimana Kemendagri sebagai pemangku kebijakan dapat membuat terobosan terkait hal tersebut?

#### **Jawaban:**

Salah ucap memiliki arti yang berbeda. Bahasa asing yang digunakan dalam konteks keilmiah harus diterjemahkan ke dalam bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Hal ini bisa ditindaklanjuti agar bahasa asing tidak lebih unggul daripada bahasa Indonesia. Bahasa publik dan bahasa keilmuan harus dibedakan.

#### **Penanya 2**

Nama : Yani Paryono  
Instansi : Balai Bahasa Jawa Timur

#### **Pertanyaan:**

1. Kami mengalami kesulitan ketika para pejabat daerah berpegang teguh pada peraturan Kemendagri tentang naskah surat dinas, mereka tidak mau mengubah format bahasa naskah dinas.
2. Sanksi dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik harus segera dibuat untuk menegakkan peran bahasa Indonesia di ruang publik.

#### **Jawaban:**

1. Harus dibedakan penggunaan bahasa di ruang publik dan ranah ilmiah. Untuk ranah ilmiah, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baku agar tidak ada kesalahan pemaknaan.
2. Kami akan mengevaluasi kembali pedoman penulisan naskah dinas yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penggunaan bahasa dalam pedoman tata naskah dinas tersebut yang mungkin perlu diubah.
3. Naskah surat dinas itu seharusnya menjadi perhatian. Nanti kita akan bicarakan dengan Sekretariat Jenderal. Naskah dinas memang ada formatnya. Namun, mungkin yang dimaksud adalah bahasanya, bukan formatnya. Kata *dan* dan *dari* digunakan di awal kalimat dalam surat dinas itu juga harus sering diingatkan.



4. Dasar penetapan sanksi adalah aturan yang lebih tinggi. Sanksi dapat berupa sanksi sosial, administratif, dsb.

**Penanya 3**

Nama : Rizki Abrian  
Instansi : Universitas Airlangga

**Pertanyaan:**

Bagaimana cara pemerintah menegakkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik agar masyarakat sadar akan pentingnya nasionalisme? Apakah dengan membuat sanksi untuk mengatur masyarakat menggunakan bahasa Indonesia?

**Jawaban:**

1. Nilai-nilai integritas harus ditanamkan untuk menumbuhkan kesadaran akan nasionalisme dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia akan menguatkan kesadaran masyarakat tentang kesatuan bangsa Indonesia. Tumbuhnya semangat nasionalisme itu dilihat saat ada di luar negeri, misalnya. Bendera terbalik saja kita tersinggung.
2. Bahasa daerah juga jangan sampai hilang karena orang luar negeri juga banyak yang belajar bahasa daerah.

**Isu-Isu Penting:**

1. Integritas harus ditanamkan untuk menumbuhkan kesadaran akan nasionalisme dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Kebahasaan yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik perlu dibuat.



## 2. Penegakan Pelaksanaan Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Pembicara	: La Ode Ida
Jabatan	: Komisaris Ombudsman
Hari, Tanggal	: Selasa, 30 Oktober 2018
Pukul	: 08.00—09.30
Moderator	: Drs. M. Abdul Khak, M.Hum.
Pencatat	: Anita Astriawati Ningrum

Bu Najwa, ini mohon sabar sedikit. Ya, ini catatan saya yang tidak kelar, cukup ini saja. Catatan saya tidak kelar, Bapak/Ibu, karena tadi pagi di tetangga saya ada kebakaran dan saya tampil di sini, sebetulnya saya baru tahu kemarin sore kalau saya ada tampil di sini pada pagi hari ini.

Pak Yanus yang kami tugas sudah membuat hasil penelitian dan saya kira sudah ada di hadapan Bapak/Ibu. Penelitiannya itu tentang pelayanan publik dan penggunaan bahasa Indonesia. Saya kira ini merupakan kerja sama dengan lembaga bahasa, kalau tidak salah.

Nah, saya mau pakai istilah ketidakpatuhan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, ketidakpatuhan terhadap bahasa Indonesia ini seperti apa *sih* sebetulnya? Tadi *kan* sudah saya jelaskan. Ketika perkembangan kosakata dalam kamus bahasa Indonesia begitu cepat, sebetulnya bahasa Indonesia bisa muncul lebih banyak lagi dalam masyarakat sebagai kamus yang hidup, istilah dalam bahasa Inggrisnya *living dictionary*. Saya kira, ini jadi acuan yang kita gunakan saat ini untuk menyatakan apakah kata yang kita itu bahasa Indonesia atau bukan adalah kamus bahasa Indonesia. Sekali lagi sudah diakui bahwa ternyata perkembangan kosakata di kamus bahasa Indonesia yang kita buat itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang ada di *Oxford Dictionary*. Saya kira itu penting untuk dicatat.

Ketidakpatuhan merupakan bagian dari nalar administratif dalam undang-undang pelayanan publik. Kita lihat contoh berikut ini. Saya kira, kita semua sudah tahu bahwa ada 13 pasal dalam undang-undang bahasa kita yang mengharuskan atau mewajibkan kita menggunakan bahasa Indonesia. Kewajiban berbahasa Indonesia itu sekali lagi harus ditafsir ulang ketika kita terus mengakomodasi kamus yang hidup dalam masyarakat. Bahasa masuk dalam undang-undang bahasa Indonesia, ada 13 pasal, tetapi harus dicatat juga bahwa tidak ada sanksi terhadap pelanggar kewajiban, tidak ada sanksi bagi pelanggar kewajiban. Sementara itu, kita negara hukum yang sebetulnya menganut sanksi. Kepatuhan sebetulnya bukan kepatuhan hukum, melainkan ketakutan terhadap sanksi. Itu negara hukum yang kita anut, rezim ketakutan terhadap sanksi, bukan kepatuhan terhadap hukum. Kalau yang kita anut adalah kepatuhan terhadap hukum, 13 pasal di situ menerangkan bahasa Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang berkenaan sanksi pidana itu hanya pasal yang terkait dengan bendera negara. Itu kita lihat dalam Pasal 66 sampai Pasal 71: siapa yang menghina bendera, membakar bendera, dan sebagainya akan terkena sanksi pidana. Namun, ketika tidak menggunakan bahasa Indonesia, ketiga belas kewajiban tadi tidak ada sanksinya sama sekali. Maka dari itu, banyak orang yang tidak patuh.



Berikut, ini temuan di lapangan yang sebagian sudah bisa diadopsi dari sini, sudah bisa ditemukan dalam catatan ini. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini kita dipatok untuk menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu acuan atau pedoman untuk menyatakan benar atau tidaknya penggunaan ejaan. Salindia berikut ini tentang fakta-fakta lapangan dalam kantor-kantor pelayanan publik. Fakta-fakta lapangan di kantor-kantor pelayanan publik menunjukkan bentuk-bentuk penggunaan bahasa Indonesia yang tidak patuh pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Berikut, ini contoh pencampuran penggunaan bahasa. Ini sebetulnya, istilahnya bahasa asingnya, Pak Dirjen, Bu Najwa, kalau saya tidak salah, *code mixed*, campur kode, campur aduk begitu. Coba lihat lagi, kita lihat contoh-contoh lagi. Ini temuan kami di lapangan juga: *coaching clinic* ya, itu lalu dicampur lagi dengan *membimbing Anda dalam pembuatan SIM*. Komplain masyarakat, ada campur aduk dan itulah yang hidup. Nah, kalau sudah kita akui bahwa yang hidup adalah teorinya, yang hidup bisa dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah yang seperti ini kelak bisa dimasukkan ke dalam kamus bahasa Indonesia sehingga dibenarkan. Berikut, ini contoh-contoh saja, potret di tempat kita selalu berurusan, urus KTP, urus SIM, urus apa saja, itu faktanya seperti ini. Nah, berikut, berikut, nah ini, pencampuran penggunaan bahasa dengan bahasa daerah itu ada macam-macam. Coba kalau di Jakarta ada kata *kite*: “Mari *kite* jaga Kota *Jakarta*”. Di Makassar, Bu Najwa, itu di kampung saya juga digunakan. Apalagi politisi-politisi itu *kan* kampanye. Pejabat pun menggunakan istilah-istilah daerah. Yang dari kampung, supaya “wah”, ini dari kampung saya, dia tahu bahasa daerah bisa dipilih. Berikut kita lihat contoh-contohnya. Coba lihat, kami berikan *gasan tiau sabharata*. Ini bahasa apa? Ini contoh-contoh penggunaan bahasa daerah. Di lambang-lambang daerah juga seperti itu. Berikut, berikut ini kita percepat saja. Ini semua adalah contoh ketidakpatuhan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar itu. Teman saya yang ahli bahasa juga antropolog mengatakan bahwa itu terjadi dan tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang memberikan mereka sanksi karena memang tidak ada sanksinya jika tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Berikut, coba lihat, ya, saya sepuluh tahun bekerja di DPD. Saya pimpinan DPD yang bertanggung jawab untuk hubungan internasional. Saya rutin mengikuti pertemuan-pertemuan internasional, pertemuan parlemen, dan pertemuan apa saja. Pada pertemuan parlemen itu, kewajiban tadi betul-betul dilupakan. Ada yang justru menggunakan pidato lengkap, nama resminya, istilahnya, *counter statement*. Itu berupa pandangan peserta dari negara kita yang dibacakan, disampaikan tidak dalam bahasa Indonesia, tetapi bahasa Arab atau bahasa Inggris. Sementara itu, Kamboja, Kamboja negara kecil, perwakilan mereka menggunakan bahasa Kambojanya. Vietnam juga begitu. Negara-negara kecil menggunakan bahasanya karena ada penerjemah. Fasilitas penerjemah lebih fasih menggunakan bahasa itu sebetulnya dibandingkan dengan bahasa lain. Kita sendiri ada undang-undang bahasa, punya kewajiban tadi, tetapi pejabatnya sendiri tidak memakai bahasa Indonesia, justru pakai bahasa asing. Nah, di luar negeri penggunaan bahasa asing itu biasa saja.

Berikut, nah, kalau dalam rapat-rapat di kantor saja, di kantor kita masing-masing, Pak, ada tidak yang semua patuh menggunakan bahasa Indonesia yang baik? Istilah yang muncul macam-macam, dalam singkatan, kemudian istilah asing,



yang kadang kala tidak bisa kita ikuti. Jika muncul istilah baru, itu bisa terangkan, betul tidak? Tidak ada yang bisa dipersalahkan. Penggunaan istilah gaul itu *kan* lebih milenial, jadi, orang-orang tua pun menggunakan istilah gaul.

Berikut, nah, kebiasaan ini dari generasi baru saya kira. Ini tidak bisa dipungkiri juga. Ini saya kira, generasi baru milenial ini kreatif dalam memunculkan istilah-istilah yang kemudian barangkali bisa diadopsi pula dalam kamus bahasa Indonesia yang menambah kosakata, sebagai tambahan kosakata. Penggunaan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi sehari-hari, minimal campur aduk dengan bahasa atau istilah asing. Penggunaan istilah gaul, produktivitas anak-anak muda ini juga harus dicermati. Ini *kan* bahasa slang. Bahasa-bahasa slang itu sebetulnya kreativitas anak-anak muda.

Berikut, praktik tulisan di media massa dan karya ilmiah. Pak Amich, sebagian di antara kita, saya kira penulis. Saya menulis sejak mahasiswa. Saya mulai kreatif sekali mencari honor, sampai bosan menulis. Hampir ribuan artikel yang saya tulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu menggunakan istilah asing yang sebetulnya penyederhanaan. Kita bisa katakan *matahari* sebagai *sun*, misalnya. Kita “menghanguskan apa yang sudah ada”, istilah pendeknya dalam bahasa Inggris “the fire”. Itu sebetulnya penyederhanaan atau mempersingkat arti yang panjang dalam bahasa Indonesia. Kalau saya sebagai penulis menggunakan istilah “the fire”, kira-kira orang sudah mengerti dan kira-kira redaksi-redaksi itu juga sudah mengerti. Kemudian, istilah gaul itu, ya, saya kira karena pada tingkat tertentu, istilah dalam bahasa asingnya itu populer lebih dahulu dibandingkan dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kata *incumbent* dikenal sebelum kata *petahana*. Kata *unduh*, *unggah*, atau *pindai* muncul belakangan dibandingkan dengan kata *download*, *upload*, atau *scan*. Jadi, sebetulnya bahasa asing yang lebih dahulu populer kemudian belakangan muncul istilah dalam bahasa Indonesia.

Berikut, iklan produk barang dan jasa pihak swasta di ruang publik. Lihat saja, produknya berbahasa Inggris, padahal ada kewajiban tadi sebetulnya. Campuran istilah asing, gaul, dan sebagainya. Berikut, inilah yang kita amati, mengapa tidak ada kepatuhan dalam penggunaan bahasa. Ini saya kira ada penggunaan istilah yang merupakan hak pribadi, tidak bisa dilarang. Siapa yang sebetulnya bisa dilarang? Siapa yang harus/wajib? Itu tidak bisa dipaksakan kepada semua orang, kecuali kepada pejabat-pejabat dalam acara-acara resmi. Kebanggaan terhadap bahasa, menurut saya sebagai sosiolog, bahwa bahasa itu sebetulnya ada stratanya. Orang yang hanya berbahasa Indonesia di luar (negeri), dia menjadi inferior di tempat-tempat internasional. Dia tidak bisa bergaul, tidak bisa berkomunikasi. Bagaimana dia bisa bicara? Komunikasi membangun hubungan antarnegara. Jadi, kalau hanya bisa bahasa Indonesia, kita menjadi inferior. Jadi, bahasa mana yang paling banyak digunakan? Stratanya teratas adalah bahasa Inggris sekarang. Kemudian bahasa Prancis digunakan di Eropa dan di Afrika, negara-negara jajahannya. Kemudian Spanyol juga begitu, kemudian Arab, kemudian berikutnya Cina, kemudian ada Jepang juga, Korea. Indonesia urutan ke berapa? Kecil sekali. Jadi, strata ini keras sebetulnya. Bahasa bisa dilihat sebagai kelas juga saya kira. Kemudian, dari sisi akademik, saya sudah katakan tadi, itu pengaruh hal tertentu. Kreativitas generasi milenial, pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa asing dan bahasa diperbolehkan atau tidak ada larangan dalam penerapannya selama benar dalam penulisannya. Yang tadi saya katakan, tampak dari rezim sanksi terhadap hukum. Sanksi hukum tidak berarti patuh pada hukum. Kepatuhan kita itu dalam bentuk



maladministrasi pelayanan publik dalam istilah *endorsement*, tetapi ketidakpatuhan sendiri ternyata adalah produk dari kebiasaan pemerinta kita. Negara kita yang peradabannya sekali lagi tidak patuh pada hukum, tetapi patuh pada sanksi.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Gelar Wicara**

Pembicara	: La Ode Ida
Jabatan	: Komisaris Ombudsman
Hari, Tanggal	: Selasa, 30 Oktober 2018
Pukul	: 08.00—09.30
Moderator	: Drs. M. Abdul Khak, M.Hum.
Pencatat	: Anita Astriawati Ningrum

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. KBBI sebagai acuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi harus diingat bahwa dinamika perkembangan bahasa di masyarakat lebih cepat.
2. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia (UU nomor 24/2009), Pasal 26 s.d. 39.
3. Tidak ada sanksi terhadap pelanggar kewajiban berbahasa Indonesia. Hal ini berbeda dengan pelanggaran lain (bendera dan lambang negara).
4. Pencampuran penggunaan bahasa (campur kode) terjadi antara bahasa Indonesia dan bahasa asing dan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
5. Berbagai kesalahan dan ketiakteraturan ini tidak diberi sanksi.
6. Dalam forum internasional, pejabat pun masih menggunakan bahasa Inggris atau bahkan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa Indonesia, padahal kita punya regulasi dan di forum tersebut disediakan penerjemah. Negara kecil seperti Vietnam dan Kamboja tetap menggunakan bahasa ibu mereka.
7. Di forum nasional, kita masih sering menggunakan istilah asing.
8. Kebiasaan generasi muda adalah menggunakan bahasa gaul.
9. Praktik tulisan di media massa dan karya ilmiah: penggunaan istilah asing dan istilah gaul (milenial), misalnya, petahana, unduh, pindai.
10. Bahasa pada iklan produk barang dan jasa campur aduk. Penyebabnya adalah (1) penggunaan istilah adalah hak pribadi; (2) yang bisa diatur adalah pejabat; (3) merasa inferior jika tidak menguasai bahasa tertentu; suatu bahasa menjadi syarat masuk dunia kerja dan lebih sering digunakan di dunia bisnis, (4) istilah akademik, (5) kreativitas generasi milenial, dan (6) tidak adanya sanksi.





### **3. Bahasa, Sastra, dan Teknologi Informasi: Menyikapi Ancaman, Menjajaki Peluang**

#### **BAHASA, SASTRA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI: MENYIKAPI ANCAMAN, MENJAJAKI PELUANG**

**Andika Dutha Bachari**

Universitas Pendidikan Indonesia

[andika@upi.edu](mailto:andika@upi.edu)

*“Information technology and the internet are rapidly transforming almost every aspect of our lives - some for better, some for worse”  
(Langdarf, 2017)*

#### **PENGANTAR**

Bahasa, sastra, dan teknologi informasi tampak sebagai entitas yang setara atau barangkali kita bisa menyebut bahwa ketiganya memiliki sifat yang sejajar. Tampak tidak ada hal yang istimewa dari ketiganya. Biasa saja. Salah satu di antara ketiganya tiada yang serta merta terlihat superior berperan sebagai faktor determinan bagi (keberadaan) faktor-faktor yang lain. Melalui pengamatan yang bebas nilai, bahasa, sastra, dan teknologi informasi akan lebih sering dipahami sebagai sebuah realita yang memang sudah seharusnya “begitu”, seperti lazimnya bernafas dan berjalan.

Simpulan kita terhadap bahasa, sastra, dan teknologi informasi yang dikonstruksi melalui cara pandang yang bebas nilai dapat dengan mudah musnah seketika saja. Kita menyadari bahwa pada saat ini teknologi informasi secara agresif (sekaligus masif) telah menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Hampir tiada ruang di dalam kehidupan manusia yang tersisa tanpa sentuhan teknologi informasi. Dengan segala produk yang diturunkannya, teknologi informasi telah memanjakan manusia di seluruh dunia dengan berbagai kemudahan, kepraktisan, dan keekonomisan yang konon belum pernah didapatkan dan dirasakan oleh manusia di zaman sebelumnya. Tanpa disadari, keterikatan manusia terhadap teknologi informasi telah mengubah cara manusia menjalani dan menyikapi kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi yang semakin melekat dalam kehidupan manusia telah membentuk pola-pola baru di dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap keberadaan bahasa dan sastra.

Pernyataan yang dikemukakan Langdarf (2017), yaitu bahwa teknologi informasi (dan internet) dengan cepat telah mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia, beberapa di antaranya menjadi lebih baik dan sebagian di antaranya menjadi lebih buruk, mengindikasikan makna bahwa kehadiran teknologi informasi dengan segala aspeknya di tengah kehidupan manusia menjanjikan peluang sekaligus ancaman. Bahasa dan sastra sebagai entitas yang melekat dalam kehidupan manusia, termasuk dua hal yang tersentuh agresivitas teknologi informasi. Seperti yang lainnya, dalam persoalan bahasa dan sastra pun ada hal yang (dapat) berubah menjadi baik, sebagian lagi ada yang berubah menjadi buruk. Dengan logika seperti itu, makalah ini akan menyajikan masalah peluang dan ancaman bagi bahasa dan sastra dikaitkan dengan fakta tentang keberadaan teknologi informasi di dalam kehidupan manusia.



## BAHASA DAN SASTRA (INDONESIA) BERJAYA: PERSPEKTIF INDONESIA

Bagi masyarakat Indonesia, bahasa Indonesia diyakini sebagai sebuah simbol kebangsaan yang memiliki daya magis ampuh untuk merekat sekat-sekat kebinekaan yang tampak jelas menganga menghiasi narasi keindonesiaan. Di tengah banyaknya ciri kebinekaan yang melekat sebagai identitas kedaerahan rakyat Indonesia, konon hanya di bawah bendera dan bahasalah, kita, rakyat Indonesia, dapat merasakan persatuan dalam satu kesamaan yang tidak bisa dibantah. Bagi rakyat Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah sekadar alat komunikasi yang berfungsi sebagai instrumen pergaulan, melainkan juga identitas kebangsaan yang melambangkan kebesaran jati diri keindonesiaan (lihat Anderson, 1990; Errington, 1992). Oleh karena itu, narasi untuk menjayakan bahasa dan sastra Indonesia bukanlah sebuah cerita yang didorong oleh sikap mengedepankan rasa romantisme keindonesiaan. Menjayakan bahasa dan sastra Indonesia adalah cita-cita luhur yang merefleksikan kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang besar, beradab, dan berkebudayaan luhur.

Kata *jaya* dalam bahasa Indonesia berarti ‘cemerlang, sukses, mapan’. Sementara itu, bentuk *menjayakan*, dalam bahasa Indonesia, berarti ‘menyebabkan jaya’. Lantas muncul pertanyaan, apa dan/atau siapa yang menjadi penyebab berjaya bahasa dan sastra Indonesia? Jawabannya adalah penutur bahasa Indonesia alias manusia Indonesia itu sendiri. Kejayaan bahasa dan sastra Indonesia hanya akan tercapai manakala manusia Indonesia memiliki derajat keunggulan yang berdampak terhadap meningkatnya posisi tawar manusia Indonesia di kancah pergaulan global. Hal tersebut menyiratkan makna bahwa membangun manusia Indonesia merupakan *condicio sine qua non* bagi terwujudnya bahasa dan sastra Indonesia nan jaya.

Secara linguistik, sebuah bahasa dikatakan berjaya apabila bahasa tersebut digunakan oleh penutur dalam jumlah yang banyak. Bahasa Inggris dikatakan sebagai bahasa yang paling berjaya secara linguistik karena jumlah penuturnya yang paling banyak. Kejayaan bahasa Inggris tidak ditentukan oleh banyaknya ragam yang dimiliki bahasa Inggris dan juga banyaknya jumlah kosakata di dalam kamus bahasa Inggris. Kejayaan bahasa Inggris, sekali lagi, karena ditentukan oleh vitalitas bahasa tersebut untuk digunakan sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bahasa kebudayaan, bahasa keagamaan, bahasa politik, bahasa pemerintahan, dan banyak lagi bidang kebutuhan atau minat manusia di dunia yang dapat dipenuhi oleh bahasa Inggris. Karena vitalitasnya itulah bahasa Inggris digunakan oleh banyak penutur di dunia (lihat Gunarwan, 1998; Alwasilah, 2008).

Sementara itu, terkait dengan ukuran untuk melihat kejayaan sastra Indonesia barangkali memang akan lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan upaya menentukan tingkat kejayaan bahasa Indonesia. Namun, gagasan yang dikemukakan Bourdieu (1993) yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya fungsi sastra adalah sastra yang dengan segala aspeknya mampu berperan sebagai alat penyampai nilai-nilai ilmu pengetahuan dan alat transformator nilai-nilai kedewasaan yang berlaku di masyarakat, perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini, sastra tidak bisa dipersepsi secara sempit sebagai alat hiburan, ilmu pengetahuan, dan/atau dokumentasi kebudayaan belaka. Lebih dari itu, sastra dengan segala aspeknya memiliki andil secara aksiologis dalam pembangunan manusia Indonesia yang bineka. Dalam konteks Indonesia, sastra yang berjaya dapat juga diukur



dengan kemampuannya mentransformasikan warna lokal kedaerahan yang dapat mengilhami terjadinya transformasi nilai-nilai yang berlaku secara universal.

### **MENYIKAPI ANCAMAN, MENJAJAKI PELUANG: KASUS INDONESIA**

Perkembangan teknologi informasi seperti yang terjadi sekarang ini telah diprediksi akan terjadi jauh hari sebelumnya dengan sebutan *globalization village* (lihat McLuhan, 1962; Toffler, 1970). Terkait dengan perkembangan ini, Schwab (2017) menyebutkan bahwa teknologi informasi yang menjelma dalam wujud super komputer dan teknologi nano merupakan ciri utama sebuah fase yang disebut dengan fase Revolusi Industri 4.0 (4IR).

Perkembangan teknologi informasi melahirkan realitas yang dapat dimaknai sebagai peluang sekaligus ancaman bagi bahasa dan sastra Indonesia. Dalam konteks ini, upaya menjayakan bahasa dan sastra Indonesia dalam perspektif manajerial perlu ditempuh dengan skema yang bisa jadi bersifat konsolidasi dan bahkan bisa juga bersifat ekspansi. Artinya, diperlukan strategi untuk mengonversi peluang menjadi kekuatan dan menangkal ancaman menjadi kelemahan yang mematikan.

Ada beberapa fenomena yang muncul sekaitan dengan berkembangnya teknologi informasi dan keterkaitannya terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Fenomena tersebut dapat muncul sebagai peluang yang dapat dimaksimalkan menjadi kekuatan. Namun, di sisi yang lain, fenomena tersebut dapat juga berperan menjadi ancaman. Berikut adalah beberapa fenomena yang muncul terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan dampaknya terhadap bahasa dan sastra.

1. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan saluran komunikasi baru dalam berbagai modus → meningkatnya kejahatan siber → konflik horizontal meluas.
2. Perkembangan teknologi informasi telah mengikis batas wilayah kenegaraan yang berdampak pada terciptanya masyarakat global atau transnasional yang dicirikan oleh melemahnya jati diri kebangsaan (nasionalisme) → kontak bahasa → *linguistic chaotic situation*.
3. Perubahan perilaku dan daya biologis pada generasi pada zaman 4IR → potensi distraksi yang cukup tinggi pada individu → melemahnya sikap bahasa.
4. *Information overload*, bahkan tidak terverifikasi → bisnis informasi akan menjadi *trend* → memicu terjadinya angka kejahatan verbal.
5. Terciptanya produk dan pasar baru → *language competition* → inferioritas penutur bahasa Indonesia.

### **PENUTUP**

Sebagai penutup kajian ini, saya merasa perlu menyampaikan beberapa simpulan dan rekomendasi terkait persoalan yang telah saya kemukakan melalui tulisan singkat ini. Beberapa hal yang dianggap penting, saya kemukakan seperti berikut.

1. Perlu konsistensi dan dukungan politik dari pemerintah untuk menegakkan regulasi mengenai bahasa dan sastra sebagai wujud komitmen membangun manusia Indonesia seutuhnya.
2. Menjayakan bahasa dan sastra Indonesia mengandung pengertian sebagai upaya membangun manusia Indonesia berkualitas yang memiliki daya saing dan daya tawar yang tinggi dalam pergaulan global.



3. Revitalisasi konsep pendidikan bahasa (Indonesia) sebagai *entry point* untuk membekali manusia Indonesia yang memiliki kompetensi seperti berikut.
  - A. Keterampilan Belajar dan Inovasi
    - a. Berpikir Kritis dan Memecahkan Masalah
    - b. Kreatif dan Berinovasi
    - c. Berkomunikasi dan Berkolaborasi
  - B. Keterampilan Mengolah Information, Menggunakan Media dan Teknologi
    - a. Literasi Informasi
    - b. Literasi Media
    - c. Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - C. Kecakapan Hidup dan Karier
    - a. Fleksibilitas dan Adaptasi
    - b. Inisiatif dan Pengendalian Diri
    - c. Keterampilan Sosial dan Pemahaman Lintas Budaya
    - d. Produktivitas dan Akuntabilitas
    - e. Kepemimpinan dan Tanggung Jawab

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alwasilah, A.C. (1997). *Politik Bahasa dan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Anderson, B. R. O. G. (1990). *Language and power: Exploring political cultures in Indonesia*. Cornell University Press
- Bourdieu, P. (1993). *The field of cultural production: Essays on art and literature*. Columbia University Press.
- Errington, J. J. (1992). On the ideology of Indonesian language development. *Pragmatics. Quarterly Publication of the International Pragmatics Association (IPrA)*, 2(3), 417-426.
- Gunarwan, A. (1998). Kedudukan dan fungsi Bahasa asing di Indonesia dalam era global '. *Kongres Bahasa Indonesia VII*. Jakarta, 28 Oktober.
- Langdarf, J. (2017). *Chief Executive Officer FX Networks and FX Productions*. 21<sup>st</sup> Century Fox.
- McLuhan, M. (1962). *The gutenberg galaxy*.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Crown Business.
- Toffler, A. (1970). *Future shock*. Amereon Ltd., New York.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Pembicara Sidang Panel Sesi 3 Ruang 4**

Pembicara : Dr. Andika Dutha Bachri, M.Hum.  
Judul Makalah : “Bahasa, Sastra, dan Teknologi Informasi: Menyikapi Ancaman, Menjajaki Peluang”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 10.15—11.45  
Moderator : Dr. Felicia Nuradi Utorodewo  
Pencatat : 1. Purwaningsih  
2. Ferdinandus Moses  
3. Kunkun Purwati

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Bagaimana bentuk keterkaitan bahasa, sastra, dan teknologi informasi? Keduanya bisa saling memengaruhi.
2. Perkembangan teknologi informasi seperti yang terjadi sekarang ini telah diprediksi akan terjadi jauh hari sebelumnya dengan sebutan *globalization village*. Terkait bahwa teknologi informasi yang menjelma dalam wujud super komputer dan teknologi nano merupakan ciri utama sebuah fase yang disebut dengan fase Revolusi Industri 4.0 (4IR).
3. Teknologi informasi memiliki peluang dan ancaman bagi bahasa dan sastra Indonesia.
4. Perkembangan teknologi informasi melahirkan realitas yang dapat dimaknai sebagai peluang sekaligus ancaman bagi bahasa dan sastra Indonesia. Dalam konteks ini, upaya menjayakan bahasa dan sastra Indonesia dalam perspektif manajerial perlu ditempuh dengan skema yang bisa jadi bersifat konsolidasi dan bahkan bisa juga bersifat ekspansi. Artinya, diperlukan strategi untuk mengonversi peluang menjadi kekuatan dan menangkal ancaman menjadi kelemahan yang mematikan.
5. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan, tetapi juga memiliki ancaman. Hal ini berdampak pada kejahatan siber yang meningkat sebesar 50%. Sementara di sisi lain, kejahatan siber menghasilkan kejahatan horizontal. Ini merupakan tantangan bagi ahli bahasa untuk menangani kasus-kasus kejahatan siber dari segi kebahasaan.
6. Dalam konteks menjayakan bahasa dan sastra Indonesia, faktor pendorongnya tidak terletak pada linguistik, tidak ditentukan oleh banyaknya kosakata, tetapi pada ikhtiar membangun sikap berbahasa penutur bahasa Indonesia.
7. Perubahan perilaku dan daya biologis pada generasi pada zaman 4IR memiliki potensi distraksi yang cukup tinggi pada individu dan mengakibatkan melemahnya sikap bahasa.
8. Pelindungan terhadap penulis rendah sehingga banyak orang menjadi enggan menulis. Perlu melindungi para penulis dari kejahatan teknologi, seperti pembajakan buku.



9. Menjayakan bahasa dan sastra Indonesia mengandung pengertian sebagai upaya membangun manusia Indonesia berkualitas yang memiliki daya saing dan daya tawar yang tinggi dalam pergaulan global.
10. Melakukan revitalisasi terhadap konsep pendidikan bahasa (Indonesia) sebagai *entry point* untuk membekali manusia Indonesia yang memiliki kompetensi, seperti keterampilan belajar dan inovasi; berpikir kritis dan memecahkan masalah; kreatif dan berinovasi; serta berkomunikasi dan berkolaborasi.

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Maftutu  
Instansi : Ikapi

#### **Pertanyaan:**

Perlu ada undang-undang dan sanksi bagi mereka yang tidak menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Harus ada keberanian dan ketegasan dari pimpinan pusat yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan bahasa, termasuk kebijakan mengenai kejahatan siber.

#### **Jawaban:**

Pemberlakuan undang-undang dan sanksi memang perlu ada daya paksa dan pemerintah diharapkan berani mengambil langkah ini. Jika kita lihat di Jepang, ketika produk Eropa masuk ke negaranya, penamaan produk akan diubah sesuai dengan nama Jepang. Diharapkan Indonesia dapat melakukan hal seperti ini. Hal itu bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil dahulu, seperti pada nama-nama produk.

#### **Penanya 2**

Nama : Leo  
Instansi : Palembang

#### **Pertanyaan:**

Beda bahasa tulis dan bahasa lisan bagaimana mengajarkannya?

#### **Jawaban:**

Pendidikan dan pembelajaran bahasa perlu direvitalisasi. Banyak praktik bahasa yang salah dalam mengajarkan bahasa. Namun, ini juga memerlukan banyak hal yang terkait terutama pemangku pendidikan.

#### **Penanya 3**

Nama : Edi Suryanto  
Instansi : Surakarta

#### **Pertanyaan:**

Bagaimana mengartikan “menjayakan bahasa Indonesia” di tengah arus teknologi dan komunikasi saat ini? Ada pernyataan keberhasilan bahasa sangat bergantung pada penggunaannya. Ada slogan kepribadian seseorang bergantung pada ucapannya. Mungkin slogan itu bisa kita analogikan kembali menjadi kepribadian seseorang bergantung pada tarian jari kita.



**Jawaban:**

“Menjayakan bahasa Indonesia” mengartikan membangun manusia yang memiliki nilai jual tinggi. Bukan dilihat dari jumlah kosakatanya, tetapi dari penutur bahasanya.

Ada istilah “berhenti di kamu”, artinya tidak menyebarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Salah satu kejahatan siber itu adalah berita bohong atau hoaks. Banyak dari golongan intelektual yang juga terjebak dalam kejahatan siber itu. Kejahatan siber ini juga sangat membahayakan.

**Isu-Isu Penting:**

1. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan terhadap masyarakat Indonesia untuk menggunakan saluran komunikasi baru dalam berbagai modus. Namun, hal ini juga meningkatkan kejahatan siber serta konflik horizontal yang semakin meluas. Peran ahli bahasa sangat penting dalam menangani kasus-kasus penggunaan bahasa di media internet.
2. Superioritas bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, masih terlihat nyata di ruang publik. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mengatasnamakan globalisasi. Globalisasi akhirnya dipakai sebagai alasan untuk menggunakan berbagai macam bahasa asing yang mengganti bahasa Indonesia di semua aspek kehidupan.
3. Menjayakan bahasa dan sastra Indonesia mengandung pengertian sebagai upaya membangun manusia Indonesia berkualitas yang memiliki daya saing dan daya tawar yang tinggi dalam pergaulan global.



#### 4. Nasionalisme dalam Komunikasi Global (Pelanggaran atas Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik)

### NASIONALISME DALAM KOMUNIKASI GLOBAL (Pelanggaran atas Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik)

**Azwar**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
azwarstmalaka@upnvj.ac.id

#### **Abstrak**

Makalah ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran terhadap peraturan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Persoalan dalam makalah ini dianalisis menggunakan teori globalisasi. Secara khusus penulis menggunakan konsep *disjuncture* yang dikemukakan Arjun Appadurai (1996). Sementara itu, metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa arus globalisasi telah menyeret Indonesia secara umum, khususnya Jakarta ke dalam dunia global yang homogen sehingga dipilih sebagai lokasi penelitian ini. Homogenisasi pada dasarnya tidak hadir begitu saja, tetapi hadir dari persoalan yang terpisah-pisah, yang menurut Appadurai disebut melalui *ethnoscapes*, *technoscapes*, *financescapes*, *mediascapes*, dan *ideoscapes*. Homogenisasi dalam kajian ini terlihat dari penggunaan bahasa asing di ruang publik di Jakarta. Padahal, peraturan perundang-undangan mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan di ruang publik.

**Kata-kata kunci:** globalisasi, homogenisasi, regulasi, ruang publik

#### **Abstract**

*This paper is motivated by many violations of the rules on the preference of Indonesian language in the public sphere. The problems in this paper are analyzed by using Globalization Theory. In particular, the author uses the concept of disjuncture proposed by Arjun Appadurai (1996). Meanwhile, the research method of this paper using descriptive qualitative method. The findings in this study indicate that the current globalization has dragged Indonesia in general, especially Jakarta into a homogeneous global world thus it is selected as research location of this paper. Homogenization is not simply present, but comes from the fragmentary problems that Appadurai called through ethnoscapes, technoscapes, financescapes, mediascapes, and ideoscapes. Homogenization in this study is evident from the use of foreign languages in public spaces in Jakarta, whereas legislation regulates that Indonesian language must be used in the public sphere.*

**Keywords:** globalization, homogenization, regulation, public sphere

#### **PENDAHULUAN**

Bahasa Indonesia hadir mengemban amanat besar sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Setidaknya hal tersebut sudah diakui oleh segenap bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Pernyataan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945 dan ketika Undang-Undang Dasar Negara





Republik Indonesia disahkan menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara.

Bahasa Indonesia kini seperti kain usang yang dicampakkan pemakainya. Ia perlahan dibiarkan menuju kepunahan seiring dengan berkembangnya zaman. Sejatinya anak-anak zaman sekarang dapat meletakkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Akan tetapi, dalam kenyataannya, bahasa Indonesia dibiarkan tidak berdaulat di tanah airnya sendiri. Kecurigaan bahasa Indonesia dibiarkan tidak berdaulat di tanah airnya sendiri dapat dilihat pada kenyataan tidak ditegakkannya regulasi kebahasaan. Salah satu regulasi tentang kebahasaan yang sering dilanggar adalah pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Untuk membuktikan kekhawatiran itu, lihatlah fenomena kebahasaan yang terjadi akhir-akhir ini. Jika berjalan di kota-kota besar Indonesia, masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan papan nama dan gedung-gedung yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Informasi di ruang publik, seperti penunjuk jalan di jalan raya, nama gedung, dan iklan luar ruangan menggunakan bahasa asing.

Sekilas, fenomena kebahasaan di atas terlihat sebagai bentuk ketidakpercayaan diri bangsa Indonesia terhadap bahasa negara dan bahasa nasionalnya. Di satu sisi, bahasa Indonesia adalah bahasa dengan jumlah penutur terbesar keempat di dunia. Namun, di sisi lain, justru masyarakatnya sendiri tidak menjunjung dan menggunakan bahasa Indonesia secara baik. Padahal, selain digunakan oleh penduduk terbesar keempat di dunia, bahasa Indonesia juga telah teruji oleh sejarah sebagai bahasa yang mampu menyatukan beragam suku dan bahasa.

Arus globalisasi yang sangat pesat telah mendesak mundur bahasa Indonesia di ruang publik. Secara tidak langsung, bangsa Indonesia terkena imbas arus globalisasi. Ihwal pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional sebenarnya sudah disadari oleh pendiri bangsa. Selain sudah diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia juga sudah dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasar negara itu, bahasa Indonesia menjadi bagian penting dari negara Indonesia.

Pada masa sekarang ini, bahasa Indonesia juga sudah memiliki payung hukum, yaitu dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Selain itu, juga sudah ada regulasi turunan tentang penggunaan bahasa Indonesia. Untuk kasus ini beberapa pemerintah daerah juga sudah membuat perda tentang penggunaan bahasa.

Namun, pada kenyataannya regulasi yang sudah ada tidak cukup untuk melindungi bahasa Indonesia dari serangan arus global. Zaman modern justru menuntut bahasa Indonesia harus berada di urutan kedua dibandingkan dengan bahasa Inggris. Fenomena seperti diuraikan di atas dapat dilihat dari tidak ketatnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau sebagai bahasa nasional. Bahkan, di ruang publik pelanggaran penggunaan bahasa juga terjadi. Padahal, soal itu sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Pelanggaran terhadap peraturan kebahasaan ini sebenarnya bukanlah hal yang tidak disadari oleh ahli-ahli bahasa di Indonesia. Keresahaan akan makin tidak berdayanya bahasa Indonesia di tanah airnya sendiri ini sudah menjadi pembicaraan pada seminar kebahasaan, salah satunya pada Kongres Bahasa Indonesia (KBI) X



yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2013. Pada bagian ketiga belas Rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia (KBI) X dinyatakan bahwa perlu ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang kewajiban menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik, seperti papan nama dan media informasi.

Lima tahun setelah rekomendasi tersebut dirumuskan, di Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia masih ditemukan sejumlah pelanggaran penggunaan bahasa di ruang publik. Bahkan, pelanggaran itu terlihat semakin masif. Kajian ini menguraikan fenomena-fenomena pelanggaran aturan kebahasaan, terutama aturan tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Selain itu, tulisan ini juga akan menghubungkan fenomena-fenomena pelanggaran aturan kebahasaan di ruang publik dengan menipisnya rasa nasionalisme dalam komunikasi pada era global saat ini. Oleh sebab itu, penulis menjuduli tulisan ini “Nasionalisme dalam Komunikasi Global Kajian atas Penegakan Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik”.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dan untuk memfokuskan kajian, penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelanggaran peraturan tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik dan bagaimana hubungan fenomena pelanggaran peraturan kebahasaan dalam komunikasi dengan menipisnya rasa nasionalisme pada era global.

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena pelanggaran atas peraturan tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik dan menguraikan hubungan fenomena pelanggaran peraturan kebahasaan dalam komunikasi dengan menipisnya rasa nasionalisme pada era global.

## LANDASAN TEORI

Ruang publik secara harfiah berasal dari kata *ruang* dan *publik*. *Ruang* menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah rongga yang tidak terbatas, tempat segala yang ada. Sementara itu, *publik* diartikan sebagai orang banyak (umum). Secara sederhana ruang publik dapat diartikan sebagai tempat tidak terbatas yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan bersama. Namun, dalam kajian ini ruang publik lebih tepat diartikan sebagai ranah sosial milik masyarakat yang bebas dari kepentingan-kepentingan selain kepentingan masyarakat itu sendiri.

Menurut Yohanes Sumaryanto (2009) ruang publik merupakan wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Semua warga masyarakat pada prinsipnya boleh mengakses ruang tersebut. Ruang publik berfungsi sebagai tempat yang independen dari pemerintah (meskipun mungkin pendanaannya berasal dari pemerintah) dan yang otonom dari kekuatan ekonomi tertentu. Ruang publik merupakan ruang penciptaan opini nonpemerintah, sebuah ruang abstrak atau ruang fisik yang menjadi ajang pembentukan pendapat anggota masyarakat. Lebih jauh Sumaryanto juga menyampaikan bahwa ruang publik merupakan jembatan yang menghubungkan kepentingan pribadi/individu dalam kehidupan keluarga dengan tuntutan kepentingan kehidupan sosial. Informasi merupakan bagian paling utama dari ruang publik.

Teori ruang publik digagas oleh Jurgen Habermas dalam buku yang berjudul *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (1989). Buku itu merupakan terjemahan dari buku berbahasa



Jerman yang terbit pada tahun 1962. Menurut Sumaryanto ada dua pemikiran Habermas tentang ruang publik. Pertama, asal-usul ruang publik borjuis yang muncul sebagai wilayah spesifik dihadirkan untuk berposisi dengan wilayah privat. Kedua, Habermas menggagas teori ruang publik sebagai tempat berlangsungnya diskursus dan konsensus rasional tempat masalah-masalah publik dibicarakan yang disebut idealisasi ruang publik borjuis. Dalam kenyataannya, politik modern selalu tunduk pada permainan kepentingan dan perebutan kekuasaan, sekaligus juga diskusi dan debat. Teori ruang publik Habermas menempatkan kepentingan masyarakat (publik) di atas kepentingan pemerintah atau bahkan kepentingan kaum borjuis.

Sementara itu, Yadi Supriadi dalam tulisannya “Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas” menyampaikan bahwa perkembangan ruang publik memperlihatkan sebuah proses masyarakat pada kemampuan komunikasi bersama. Habermas (dalam Supriadi, 2017) membagi ruang publik ke dalam dua jenis, yaitu ruang publik politik dan ruang publik sastra. Ruang publik politik tidak hanya memperlihatkan keterbukaan ruang yang dapat diakses, tetapi memperlihatkan pula struktur sosial masyarakat yang berubah. Sementara itu, dalam ruang publik sastra, kesadaran literasi masyarakat mulai meningkat sejalan dengan kemunculan lembaga penerbitan.

Penulisan makalah ini menggunakan teori globalisasi sebagai alat untuk membedah persoalan yang dikemukakan. Antony Giddens dalam Ritzer dan Goodman (2008, hlm. 591) mendefinisikan globalisasi sebagai restrukturisasi cara-cara kita menjalani hidup dengan cara yang sangat mendalam. Ia berasal dari Barat, membawa jejak kekuasaan politik, dan ekonomi Amerika.

Sementara itu, Ulrich Beck dalam Ritzer dan Goodman (2008, hlm. 593) mendefinisikan globalisme sebagai pandangan bahwa dunia didominasi oleh perekonomian dan kita menyaksikan munculnya hegemoni pasar dunia kapitalis dan ideologi neoliberal yang menopangnya. Lebih jauh Beck menyampaikan bahwa sementara proses-proses transnasional sudah berjalan lama, globalisasi adalah proses baru setidaknya karena tiga alasan. Pertama, pengaruhnya atas ruang geografis jauh lebih ekstensif. Kedua, pengaruhnya atas waktu lebih stabil, pengaruhnya berlanjut dari waktu ke waktu. Ketiga, ada densitas yang lebih besar untuk jaringan transnasional, hubungan, dan arus pekerjaan jaringan.

Zygmunt Bauman dalam Ritzer dan Goodman (2008, hlm. 593--594) melihat globalisasi dari segi “perang ruang”. Dalam pandangannya, mobilitas menjadi faktor penstratifikasi yang paling kuat dan paling diharapkan di dunia saat ini. Jadi, pemenang dari perang ruang ini adalah mereka yang mampu bergerak secara bebas ke seluruh dunia dan dalam proses menciptakan makna bagi diri mereka sendiri. Bagi Bauman, pemenang adalah mereka yang bisa bergerak bebas dan tidak bermasalah dengan ruang, sedangkan yang kalah adalah mereka yang terikat oleh batas-batas geografis.

Tiryakian dalam Ritzer dan Goodman (2008, hlm. 587--589) mengatakan bahwa teori globalisasi muncul sebagai akibat dari serangkaian perkembangan internal teori sosial, khususnya reaksi terhadap perspektif terdahulu seperti teori modernisasi. Lebih jauh Ritzer dan Goodman menyampaikan bahwa teori ini sangat kentara bias Baratnya. Artinya, semua ide tentang kemajuan disesuaikan dengan dunia Barat. Sementara itu, ide-ide yang muncul dari luar dunia Barat tidak punya pilihan kecuali menyesuaikan diri dengan ide Barat.



Ritzer dan Goodman juga menyampaikan bahwa globalisasi dapat dianalisis secara kultural, ekonomi, politik, dan/atau institusional. Dalam tiap-tiap kasus, perbedaan kuncinya adalah apakah seseorang melihat homogenitas atau heterogenitas yang meningkat. Pada titik ekstrem, globalisasi budaya dapat dilihat sebagai ekspansi transnasional dari kode dan praktik bersama (homogenitas) atau sebagai proses yang banyak input kultural lokal dan global yang saling berinteraksi untuk menciptakan semacam perpaduan yang mengarah ke pencangkakan budaya (heterogenitas).

Asumsi dasar teori globalisasi menurut Appadurai ini adalah seperti yang dikemukakan Appadurai (1996) dalam Ritzer dan Goodman (2008, hlm. 597--598) bahwa arus global dan keterputusan di antara arus-arus tersebut. Ada lima arus global, yaitu *ethnoscapes*, *technoscapes*, *financescapes*, *mediascapes*, dan *ideoscapes*. Penggunaan sufiks {-scape}, membuat Appadurai bisa mengomunikasikan ide bahwa proses-proses ini berbentuk cair, tidak teratur, dan bervariasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Appadurai berikut ini.

Yang lebih penting, arus-arus itu tidak secara objektif bukan relasi yang tampak sama dari setiap sudut pandang visi, melainkan mereka dikonstruksikan secara perspektival, diakibatkan oleh keadaan politis, linguistik, dan historis dari beraneka aktor: negara-bangsa, multinasional, komunitas diasporik, serta kelompok dan gerakan subnasional ... dan bahkan kelompok yang berhadap-hadapan secara dekat ... aktor individual adalah lokus terakhir dari serangkaian lanskap perspektival ini karena lanskap-lanskap ini pada akhirnya dikemudikan oleh agen-agen yang mengalami sekaligus menyusun formasi yang lebih besar, terlepas dari pemahaman mereka tentang apa-apa yang diberikan oleh lanskap tersebut (2008, hlm. 598).

Lebih jauh Appadurai dalam tulisannya *Disjuncture and Difference in the Global Culture Economy* (1990) menyampaikan bahwa ada lima lanskap dalam globalisasi. Pertama, *ethnoscapes*, yaitu kelompok atau aktor yang selalu bergerak seperti turis, pengungsi, dan pekerja asing yang memainkan peran penting dalam pergeseran-pergeseran di dunia yang ditempati. Ini melibatkan gerakan aktual dan fantasi-fantasi tentang pergerakan. Lebih jauh, dalam dunia yang terus berubah orang-orang tidak dapat membiarkan imajinasi mereka diam terlalu lama dan karena itu harus menjaga fantasi-fantasi itu agar tetap hidup. Kedua, *technoscapes*, yaitu konfigurasi global dari teknologi dan fakta bahwa teknologi, baik teknologi tinggi maupun rendah, baik yang mekanistik maupun informasional, kini bergerak dengan kecepatan tinggi melintasi berbagai jenis batasan yang dulu ada. Ketiga, *financescapes*, ini melibatkan proses pasar, bursa saham nasional, dan spekulasi komoditas menggerakkan uang melampaui batas-batas nasional dengan kecepatan tinggi. Keempat, *mediascapes*, yaitu distribusi kapabilitas elektronik untuk menghasilkan dan menyebarluaskan informasi (koran, majalah, televisi, studio film) yang sekarang tersedia untuk kepentingan publik dan swasta yang semakin banyak, serta imaji dunia-dunia yang diciptakan oleh media ini. Kelima, *ideoscapes*, seperti *mediascapes*, *ideoscapes* merupakan serangkaian imaji, tetapi bersifat politis dan berhubungan langsung dengan ideologi negara dan



kontraideologi dari gerakan-gerakan yang secara eksplisit berorientasi merebut sebagian atau seluruh kekuasaan negara.

Selanjutnya, menurut Ritzer dan Goodman, ada dua hal yang secara khusus perlu dicatat tentang lanskap Appadurai. Pertama, lanskap-lanskap itu dapat dilihat sebagai proses global yang sebagian atau seluruhnya terlepas dari negara-bangsa mana pun. Kedua, arus global mengalir tidak hanya melalui lanskap tersebut, tetapi juga semakin meningkat dan melalui *disjuncture* di antara mereka. Yang lebih umum, pergerakan bebas dalam beberapa lanskap mungkin bervariasi dengan penghalangnya. Studi-studi dalam era ini harus disesuaikan dengan *disjuncture* tersebut dan implikasinya terhadap globalisasi. Fokus pada lanskap dan *disjuncture*-nya membawa studi globalisasi ke arah unik (2008, hlm. 599).

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa globalisasi tidak hadir begitu saja pada sebuah bangsa, tetapi dia mengalir pada bidang-bidang tertentu seperti diuraikan oleh Appadurai dalam teori *disjuncture*-nya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan di Jakarta, pada bulan Maret sampai dengan Mei 2018 ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Ini merupakan penelitian dasar yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, serta mengembangkan pengetahuan dan teori. Merujuk pada pendapat Patton (2002), penelitian ini dilakukan untuk menemukan atau menguji teori. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberi kontribusi bagi pengetahuan dan teori yang fundamental. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana dunia ini berjalan dan tertarik dalam menginvestigasi suatu fenomena yang terjadi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena tersebut.

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan strategi penelitian studi kasus. Studi kasus sebagaimana yang disampaikan Robert E. Stake (dalam Denzin dan Lincoln, 2009, hlm. 299) bukanlah sebuah pilihan metodologis, melainkan lebih sebagai pilihan objek yang diteliti. Peneliti memilih untuk melakukan studi kasus. Kasus merupakan satu di antara contoh-contoh lain objek penelitian. Dalam setiap penelitian apa pun kita akan memfokuskan diri pada salah satu objek. Waktu yang diperlukan untuk memfokuskan penelitian pada salah satu objek lebih singkat dan lebih pasti. Louis Smith dalam Denzin dan Lincoln (2009, hlm. 300) mengatakan bahwa kasus adalah suatu sistem yang terbatas. Dalam ilmu-ilmu sosial dan layanan kemanusiaan, kasus memiliki bagian-bagian operasional, bisa jadi bertujuan dan bahkan memiliki jiwa. Kasus adalah sebuah sistem yang padu. Bagian-bagiannya tidak harus beroperasi dengan baik, tujuan bisa jadi irasional, tetapi ia tetap sebuah sistem.

Stake lebih lanjut membedakan studi kasus menjadi tiga. Pertama, studi kasus intrinsik. Jenis ini ditempuh oleh peneliti yang ingin lebih memahami sebuah kasus tertentu. Jenis ini dilakukan tidak karena suatu kasus mewakili kasus-kasus lainnya atau karena menggambarkan sifat atau persoalan tertentu, tetapi karena dalam semua aspek kekhususan dan kesederhanaan kasus itu sendiri menarik minat. Kedua, studi kasus instrumental. Jenis ini digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu agar tersaji sebuah perspektif tentang isu atau perbaikan suatu teori. Di sini kasus tidak menjadi minat utama, tetapi berperan suportif demi memudahkan pemahaman kita tentang sesuatu yang lain. Ketiga, studi kasus kolektif. Jenis ini



tidak untuk melakukan studi kasus tentang suatu hal secara kolektif, tetapi sebagai pengembangan dari studi kasus instrumental ke dalam beberapa kasus.

Dalam penelitian “Nasionalisme dalam Komunikasi Global, Studi tentang Pelanggaran Peraturan Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik”, peneliti lebih cenderung pada studi kasus intrinsik. Peneliti memahami sebuah kasus pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya Pasal 36 dan Pasal 38.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan pemanfaatan dokumen teknis (Patton, 1991, hlm. 1). Selanjutnya, Creswell (2010, hlm. 266--267) menjabarkan lebih mendetail tentang langkah-langkah tersebut, yaitu sebagai berikut. (1) Observasi: peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat, baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti). (2) Wawancara mendalam: peneliti melakukan wawancara berhadapan-hadapan dengan partisipan. Peneliti juga mewawancarai mereka melalui telepon atau *focus group interview* yang terdiri atas enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur, bersifat terbuka, dan dirancang untuk memunculkan pandangan atau opini dari para partisipan. (3) Studi literatur: dokumen yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif bisa berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor, atau dokumen pribadi, seperti buku harian, surat, dan *e-mail*). Selain itu, dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat berupa materi audio dan visual. Data ini bisa berupa foto, objek seni, *videotape*, atau jenis lain.

Sebagai penelitian pendahuluan “Nasionalisme dalam Komunikasi Global Studi tentang Pelanggaran Peraturan Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik”, peneliti hanya menggunakan dua metode pengumpulan data dari tiga metode yang disampaikan Creswell, yaitu studi pustaka/literatur dan observasi. Peneliti memahami fenomena-fenomena pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya Pasal 36 dan Pasal 38 di Jakarta.

Selanjutnya, menurut Creswell (2010, hlm. 274--275) ada sejumlah proses umum yang bisa dilakukan oleh peneliti yaitu, (1) analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. (2) Analisis data melibatkan pengumpulan data terbuka yang didasarkan pada pertanyaan umum dan analisis informasi dari partisipan. (3) Analisis data kualitatif yang dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dan buku-buku ilmiah sering menjadi model umum yang digunakan.

Sementara itu, Patton (1991, hlm. 259) menjelaskan bahwa analisis data dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. (1) Memasang data mentah kasus: data ini terdiri atas semua informasi yang terkumpul tentang orang atau program yang diteliti. (2) Menyusun rekaman kasus: ini adalah kondensasi data mentah kasus yang mengorganisasi, mengklasifikasi, dan mengedit data mentah kasus ke dalam data yang akan diolah dan diinginkan. (3) Menulis kajian kasus secara naratif: kajian terhadap suatu kasus adalah gambaran yang mampu dibaca. Lukisan deskriptif tentang objek penelitian ini membuat semua informasi yang diperlukan dapat dibaca untuk memahami objek penelitian. Data disajikan secara



kronologis atau tematik (kadang keduanya) yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penelitian.

Dalam penulisan ini, peneliti mengelaborasi metode analisis yang disampaikan oleh Creswell dan Patton. Pada beberapa bagian, peneliti melakukan improvisasi untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang topik kajian.

## PEMBAHASAN

### 1. Pelanggaran Peraturan Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Pada bagian ketiga belas Rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia X tahun 2013 yang dilaksanakan di Jakarta, dinyatakan bahwa perlu ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehubungan dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia untuk nama dan media informasi yang merupakan pelayanan umum.

Lima tahun setelah rekomendasi tersebut, di Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran penggunaan bahasa di ruang publik. Pelanggaran penggunaan bahasa dalam ruang publik tersebut, di antaranya, pelanggaran atas penamaan bangunan/gedung, nama apartemen atau permukiman, penamaan perkantoran, nama kompleks perdagangan, nama merek dagang, nama lembaga usaha, nama lembaga pendidikan, dan nama organisasi yang didirikan di Indonesia.

Hal tersebut di atas sudah diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Ayat (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi. Ayat (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Secara ringkas dapat dikatakan ada beberapa pelanggaran, seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 ayat (3)**

NO.	REGULASI YANG DILANGGAR	PENGGUNAAN BAHASA	BENTUK PELANGGARAN
1	Pasal 36 Ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Ayat (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi. Ayat (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang,	a. Bakri Tower b. Sahid Sudirman Center c. The Pakubuwono d. Grand Hyatt Jakarta e. The City Center Batavia City f. Keraton at The Plaza g. The City Tower h. BTPN Tower i. Kuningan City j. Jaya Dream Garden k. Word Capital Tower l. Soverign Plaza	Pelanggaran atas Penamaan Bangunan>Nama Gedung



NO.	REGULASI YANG DILANGGAR	PENGGUNAAN BAHASA	BENTUK PELANGGARAN
	lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.	a. Southgate TB Simatupang Ehre Urban Luxury Meets Green Living	Pelanggaran atas Penamaan Apartemen
		b. Poin Square Apartemen	
		c. Bona Vista Apartemen	
		d. Kalibata City	
		e. Casa Grande	
		f. The Aspen Residence	
		g. Kebagusan City	
		h. Permata Hijau Residences	
		i. Signature Park Apartement IPark Avenue	
		b. South City	
		c. Bamboo Prime Residence	
		d. Synthesis Residence Kemang	
		e. Grand Trevista Rempoa	
		f. Iresidence Gust House	
		a. Secure Plaza Oleos Tower 1	Pelanggaran atas Penamaan Perkantoran
		b. Talavera Office Park	
		c. THE CEO Cilandak Executive Office	
		d. GKM Green Tower	
		e. Mangga Dua Square	
		f. Mandarin Oriental Jakarta	
		a. Pamulang Square	Pelanggaran atas Penamaan Kompleks Perdagangan
		b. Point Square	
		c. Cilandak Town Square	
		d. Lippo Mall Kemang	
		e. Living Plaza Ciputat	
		a. PHD Delivery	Pelanggaran atas Penamaan Merek Dagang
		b. Mitra 10 Building Materials and Home Improvement	
		c. Geometry Ice Cream Café and Resto	
		d. Mortar Instan MU Leading In Mortar Industry	
		e. Gradino Prestigious Secured Locks	
		a. RA Skin Care “Skin Care Body Slimming and SPA”	Pelanggaran atas Penamaan Lembaga Usaha
		b. Angel Dago Cellular	
		c. 28 Adv. And Stationary	
		d. Dagos Steak and Milk	
		e. Restoran Seafood and Indonesia Food	
		a. High Scope Indonesia “Leading The Human Development Paradigm”	Pelanggaran atas Penamaan Lembaga Pendidikan
		b. Jakarta Intercultural School	
		c. Singapore Intercultural Scholl Bona Vista	
		d. Lentera School Indonesia	
		e. Jakarta Multicultural School	





NO.	REGULASI YANG DILANGGAR	PENGGUNAAN BAHASA	BENTUK PELANGGARAN
		a. Cat Fanciers Society of Indonesia b. Centre for Strategis and International Studies (CSIS) c. Danareksa Research Institute d. Djarum Foundation e. Indonesian Cat Asociation f. Indonesian Heritage Society g. Rapid Agrarian Conflict Appraisal Institute	Pelanggaran atas Penamaan Organisasi

\*Keterangan: Data yang dituliskan di atas hanya sebagian kecil contoh-contoh pelanggaran terhadap UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36. Data tidak semua dituliskan karena terlalu banyak.

Sementara itu, pelanggaran lain seperti yang terjadi pada Pasal 38 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum; (2) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing. Artinya, penggunaan bahasa Indonesia menjadi utama untuk digunakan dalam semua media yang ada di ruang publik. Pengecualian dari hal tersebut adalah bahasa daerah atau bahasa asing bisa digunakan jika hanya menyertai bahasa Indonesia. Namun, yang terjadi adalah bahasa Indonesia justru ditinggalkan sama sekali; dan walaupun ada bahasa Indonesia, bertentangan dengan Ayat (2) Pasal 38 UU Nomor 24 Tahun 2009, yaitu bahasa Indonesia yang menyertai bahasa asing.

Secara ringkas, beberapa pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2**  
**Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009**  
**Pasal 38 ayat (1)**

NO.	REGULASI YANG DILANGGAR	PENGGUNAAN BAHASA	BENTUK PELANGGARAN
1	Pasal 38 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.	a. In b. Drive Thru c. Loading Doc Poins Square Mall d. Straight untuk menunjukkan arah Bekasi Cyber Park e. Police Office Bekasi f. Local House of Representative of Bekasi Municipality g. Turn Right h. Turn Left i. Welcome to Kampung Inggris Jakarta j. Space for the true you k. ATM Gallery	Pelanggaran atas aturan penulisan rambu umum/penunjuk jalan/fasilitas umum



---

a. For Rent Jervois Complex House	Pelanggaran atas pengutamaan bahasa Indonesia dalam bahasa
b. Ultra high performance tyres Accelera D2 Concept	spanduk/iklan luar ruangan
c. Quality Technic The 1 Are Class Service We Are The Market Leader	
d. Gingersnaps smart clothes for great kids, Justice The ultimate fashion brand for girl. Until June 3, 2018	
e. New Tenant To Check In	

---

a. ACC memberi kemudahan member of ASTRA	Pelanggaran atas penggunaan bahasa asing pada alat informasi lain yang merupakan
b. Jak Laundry	pelayanan umum
c. Surround your self with people good and good coffee	
d. Space Available	
e. For Rent Office Space Function Room	
f. Jakarta Belongs To Me (Mural)	

---

\*Keterangan: Data yang dituliskan di atas hanya sebagian kecil contoh-contoh pelanggaran terhadap UU No 24 Tahun 2009 Pasal 38. Data tidak semua dituliskan karena terlalu banyak.

Maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik Jakarta menunjukkan bahwa masyarakat lebih akrab dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Selain masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah juga tidak merasa bersalah ketika menggunakan bahasa asing. Secara sekilas dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak menganggap hal yang aneh ketika melihat penggunaan bahasa internasional di ruang publik. Padahal, secara tidak langsung penggunaan bahasa asing di ruang publik menunjukkan bahasa Indonesia kurang dihargai.

Jika dikaitkan dengan nasionalisme, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara menunjukkan menipisnya nasionalisme masyarakat Indonesia.

## 2. Nasionalisme dalam Komunikasi Global

Salah satu ironi globalisasi adalah kembali hidup seperti zaman batu, yang kuat akan makin berkuasa dan mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan yang lemah akan makin tersingkirkan. Nuril Huda dalam tulisannya “Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing” (2000) mengatakan bahwa persaingan antarbangsa makin ketat. Berikut kutipannya.

Bangsa yang memiliki keunggulan kompetitif, terutama penguasaan iptek tinggi, memiliki peluang besar untuk memenangkan persaingan tersebut. Persaingan ini telah melahirkan dua isu sentral, yaitu imperialisme iptek dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya



manusia. Bangsa yang lebih dahulu menguasai iptek cenderung melakukan lompatan-lompatan besar dalam pengembangan dan penggunaan iptek. Sebaliknya, negara-negara yang penguasaan ipteknya rendah, makin lama makin jauh tertinggal (2000, hlm. 60).

Selain itu, Huda juga menyampaikan bahwa peningkatan interaksi global memerlukan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Penguasaan bahasa asing menjadi lebih penting. Dunia global telah mendefinisikan bahwa orang-orang yang unggul adalah mereka yang menguasai bahasa Inggris karena bahasa itu sudah menjadi wahana bagi komunikasi global. Berikut kutipannya.

Dari sisi lain telah terjadi persaingan antarbahasa untuk menjadi wahana komunikasi global (*language for wider communication*). Tampaknya bahasa yang dimiliki oleh bangsa yang unggul dalam bidang ekonomi, politik, dan iptek memiliki peluang menjadi wahana komunikasi global. Bahasa Inggris tampaknya akan keluar sebagai "pemenang" dalam persaingan ini (2000, hlm. 60-61).

Fenomena bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa yang begitu digdaya tampak di Jakarta. Di ruang publik Jakarta, bahasa Inggris sudah seperti menjadi tuan rumah. Ia begitu istimewa, ditulis pada papan-papan nama gedung, menjadi bahasa periklanan, baik iklan cetak, iklan elektronik, maupun iklan luar ruangan. Demikian pula pada fasilitas-fasilitas umum lainnya. Bahkan, penjual rokok kaki lima di jalan-jalan pun seolah harus mengerti bahasa Inggris karena dianggap untuk melayani orang asing.

Maraknya penggunaan bahasa Inggris di ruang publik Jakarta tidak hadir begitu saja. Dia melewati proses panjang. Arjun Appadurai dalam tulisannya yang berjudul "*Disjuncture and Difference in the Global Culture Economy*" (1990) menyampaikan bahwa ada lima lanskap tentang globalisasi yang mengantarkan sebuah bahasa, budaya menjadi pemenang dalam komunikasi global. Pertama, *ethnoscapes* yang merupakan kelompok atau aktor yang selalu bergerak seperti turis, pengunjung, dan pekerja asing yang memainkan peran penting dalam pergeseran-pergeseran di dunia yang ditempati. Pergerakan masyarakat dunia tidak hanya menyingkirkan masyarakat Indonesia, tetapi juga meminggirkan bahasa Indonesia. Orang asing yang datang ke Indonesia, khususnya ketika penelitian ini berlangsung, dijamu sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi pergerakan mereka. Tamu-tamu yang datang disuguhi nama bangunan yang akrab dengan bahasa mereka. Mereka tidak menjadi canggung karena pada setiap tempat umum di Jakarta terdapat papan nama dengan bahasa Inggris. Silang pendapat bahwa bahasa asing juga perlu mendapat tempat di Indonesia sebenarnya tidak bisa menjadi alasan untuk menempatkan bahasa asing lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Dalam buku *Politik Bahasa Risalah Seminar Politik Bahasa* (2000) ditegaskan bahwa "Bahasa asing yang berfungsi sebagai bahasa ibu warga negara Indonesia kelompok etnis tertentu tetap berkedudukan sebagai bahasa asing".

Selanjutnya, yang kedua adalah *technoscapes*. *Technoscapes* adalah konfigurasi global dari teknologi dan fakta bahwa teknologi, baik teknologi tinggi maupun rendah, baik yang mekanistik maupun informasional, kini bergerak dengan kecepatan tinggi melintasi berbagai jenis batasan yang dulu ada. Teknologi yang



bukan produk Indonesia hadir sangat ramah dengan bahasa asing yang menyertainya. Di Jakarta fasilitas umum yang menggunakan teknologi memakai bahasa Inggris. Padahal, jika dilihat secara mendalam kebiasaan menggunakan bahasa asing dalam teknologi merupakan pelemahan terhadap bahasa nasional. Pelemahan bahasa nasional ini juga dipengaruhi oleh lambatnya pihak berwenang dalam menyosialisasikan bahasa Indonesia sebagai padanan bahasa asing dalam bidang teknologi.

Ketiga, *financescapes*. Ini melibatkan proses dengan pasar, bursa saham nasional, dan spekulasi komoditas yang menggerakkan uang melampaui batas-batas nasional dengan kecepatan tinggi. Secara ekonomi akhirnya bahasa Indonesia tidak memiliki nilai jual yang baik karena fungsinya menjadi nomor dua setelah bahasa Inggris. Konsep pencitraan merek juga didominasi oleh penggunaan bahasa asing. Merek toko, nama perusahaan, dan nama gedung cenderung menggunakan bahasa asing. Padahal, untuk nama perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Namun, ada saja celah untuk menyasati regulasi, biasanya nama perusahaan yang terdaftar memiliki nama lain untuk dikenalkan kepada masyarakat.

Keempat, *mediascapes* adalah distribusi kapabilitas elektronik untuk menghasilkan dan menyebarluaskan informasi (koran, majalah, televisi, studio film), yang sekarang tersedia untuk kepentingan publik dan swasta yang semakin banyak, dan imaji dunia yang diciptakan oleh media ini. Media tentu saja memiliki peran penting dalam rantai globalisasi. Peran penting media terbukti dengan penggunaan bahasa Inggris pada papan penunjuk jalan, spanduk-spanduk, *billboard* elektronik, dan sebagainya.

Kelima, *ideoscapes*. Seperti *mediascapes*, *ideoscapes* adalah serangkaian imaji, tetapi bersifat politis dan berhubungan langsung dengan ideologi negara dan kontraideologi dari gerakan-gerakan yang secara eksplisit berorientasi merebut sebagian atau seluruh kekuasaan negara. Secara ideologi, masyarakat sudah terbiasa menerima kehadiran bahasa Inggris dan sudah terbiasa mengesampingkan bahasa Indonesia. Dalam pergaulan, mereka sudah akrab dengan bahasa Inggris dan cenderung malu menggunakan bahasa Indonesia. Jika pola pikir seperti itu sudah terbangun, melakukan hal lain cenderung menjadi lebih mudah. Impor budaya asing dan produk kreatif dari luar negeri lebih mudah diterima oleh masyarakat yang sudah akrab dengan bahasa asing.

Upaya melindungi bahasa Indonesia di ruang publik pada dasarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri. Hadirnya regulasi yang melindungi pengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan perpanjangan dari semangat melindungi hak-hak masyarakat dari kepentingan kaum borjuis dan kapitalis pemilik modal yang hanya mementingkan keuntungan sebesar-besarnya. Jika penggunaan bahasa asing dicermati di wilayah publik di Jakarta, muara akhirnya adalah kepentingan ekonomi. Appadurai menyebutnya sebagai pertarungan di wilayah *financescapes*. Penggunaan bahasa asing bertujuan untuk membangun citra internasional pada sebuah lembaga, seperti gedung atau bangunan lain. Hal ini didorong oleh anggapan bahwa semua yang sudah terinternasionalisasikan itu memiliki nilai jual lebih dibanding dengan sesuatu yang bersifat lokal.

Seiring dengan gerakan revolusi mental, generasi muda bangsa Indonesia harus berani menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang membanggakan.



Kita rindu mendengar kepala negara berpidato dalam bahasa Indonesia yang lancar di depan sidang ASEAN atau bahkan di depan sidang PBB. Kita berharap sebelum menutup mata dapat menyaksikan bahasa Indonesia digunakan dalam perdagangan dunia. Kita ingin menyaksikan bahasa Indonesia benar-benar menjadi bahasa penghela ilmu pengetahuan. Semua itu dapat dicapai jika kita tidak keliru melihat bahasa Indonesia, kita tidak melihat bahasa sebagai alat komunikasi saja, tetapi sepantasnya kita menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah keajaiban yang telah mempersatukan kita, sesuatu yang menunjukkan keindonesiaan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelanggaran peraturan tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik di Jakarta tidak terjadi begitu saja. Bahasa Indonesia menjadi inferior karena dianggap tidak memiliki nilai jual yang baik dan tidak memiliki citra yang baik untuk merek sebuah lembaga.
2. Fenomena pelanggaran peraturan kebahasaan dalam komunikasi memiliki hubungan yang erat dengan menipisnya nasionalisme pada era global. Penggunaan bahasa asing di ruang publik di Jakarta merupakan salah satu indikasi menipisnya nasionalisme bangsa Indonesia.
3. Banyaknya penggunaan bahasa asing untuk hal-hal yang bersentuhan dengan teknologi informasi karena lambatnya ahli-ahli bahasa/pejabat berwenang menemukan padanan bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut berakibat sulitnya masyarakat menggunakan bahasa Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono. (2000). *Politik Bahasa Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Appadurai, Arjun. (1990). "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy" dalam buku *Theory, Culture, and Society*. SAGE Publication. London, Newbury Park and New Delhi. Hal 295-310.
- Denzin, Norman K dan Yvonna S.Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitatif Research*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel. (2002). *Pengetahuan dan Metode karya Penting Foucault*.Jogjakarta: Jalasutra.
- Giddens, Antony. (2010). *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Habermas, Jurgen. (2006). *Teori Tindakan Komunikatif, Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Jay, Martin. (2005). *Sejarah Mazhab Frankfurt Imajinasi dalam Perkembangan Teori Kritis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kellner, Douglas. (2010). *Budaya Media Cultural Studies, Identitas, dan Politik: Antara Modern dan Postmodern*. Jogjakarta: Jalasutra
- Littlejohn, Stephen dan Karen A Foss. (2010). *Theories of Human Communication*. (Terjemahan). Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- McQuail, Dennis. (2005). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publication.



- L.J Schrum (edt). (2010). *Psikologi Media Entertaintmen Membedah Keampuhan Periklanan Subliminal dan Bujukan yang Tak Disadari Konsumen*. Jogjakarta: Jalasutra.
- Patton, Michael Quinn. (1991). *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. London: SAGE Publications.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2008). *Teori Sosiologi Modern (Edisi Keenam)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sumaryanto, Yohanes (2009) “Ruang Publik Jurgen Habermas dan Tinjauan atas Perpustakaan Umum Indonesia,” Tesis di FIB Universitas Indonesia. Depok.
- Supriadi, Yadi. (2017). “Relasi Ruang Pubik dan Pers Menurut Habermas” dalam *Jurnal Kajian Jurnalisme Vol.I Nomor 1 tahun 2017*. Universitas Padjajaran. Bandung.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 1 Kelompok 3**

Pembicara : Azwar

Judul makalah : “Nasionalisme dalam Komunikasi Global: Pelanggaran atas Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik”

Hari, tanggal : Senin, 29 Oktober 2018

Pukul : 08.00—09.30

Moderator : Dr. Maryanto

Pencatat : Anita Astriawati Ningrum

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Latar belakang penelitian ini adalah kenyataan adanya pelanggaran penggunaan bahasa di ruang publik yang sangat marak dengan berlindung pada isu globalisasi. Misalnya, pengumuman menggunakan bahasa Inggris dengan dalih menjadi kampus internasional.
2. Menurut Appadurai (1996) ada lima asumsi dasar dalam teori globalisasi, yaitu *ethnoscapes*, *technoscapes*, *financescapes*, *mediascapes*, dan *ideoscapes*. Pendekatan globalisasi Appadurai ini bisa menjelaskan mengapa bahasa Indonesia kalah dengan bahasa asing lain.
3. Yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini adalah banyaknya nama kantor atau gedung yang menggunakan bahasa asing, padahal ada peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang iklan luar ruangan. Bahasa Inggris tidak boleh menjadi dominan.
4. Appadurai dalam tulisannya yang berjudul “Disjuncture and Difference in the Global Culture Economy” (1990) menyampaikan bahwa ada lima lanskap dalam inti pemikirannya tentang globalisasi.
5. Pertama, *ethnoscapes* yang merupakan kelompok atau aktor yang selalu bergerak seperti turis, pengungsi, dan pekerja asing yang memainkan peran penting dalam pergeseran-pergeseran di dunia yang ditempati. Ini melibatkan gerakan aktual dan fantasi-fantasi tentang pergerakan. Lebih jauh, dalam dunia yang terus berubah orang-orang tidak dapat membiarkan imajinasi mereka diam terlalu lama dan karena itu harus menjaga fantasi-fantasi itu agar tetap hidup.
6. Kedua, *technoscapes*, yaitu konfigurasi global dari teknologi dan fakta bahwa teknologi, baik teknologi tinggi maupun rendah, baik yang mekanistik maupun informasional, kini bergerak dengan kecepatan tinggi melintasi berbagai jenis batasan yang dulu ada.
7. Ketiga, *financescapes*. Ini melibatkan proses dengan pasar, bursa saham nasional, dan spekulasi komoditas menggerakkan uang melampaui batas-batas nasional dengan kecepatan tinggi.
8. Keempat, *mediascapes*, yaitu distribusi kapabilitas elektronik untuk menghasilkan dan menyebarluaskan informasi (koran, majalah, televisi, studio film), yang sekarang tersedia untuk kepentingan publik dan swasta yang semakin banyak, dan imaji dunia-dunia yang diciptakan oleh media ini.



9. Kelima, seperti *mediascapes*, *ideoscapes* adalah serangkaian imaji, tetapi bersifat politis dan berhubungan langsung dengan ideologi negara dan kontraideologi dari gerakan-gerakan yang secara eksplisit berorientasi merebut sebagian atau seluruh kekuasaan negara.
10. Pada KBI X 2013 sudah ada rekomendasi untuk memberikan tindakan tegas kepada pelanggaran aturan penggunaan bahasa di ruang publik.
11. Penelitian ini merujuk pada Pasal 36 dan 38 UU Nomor 24 Tahun 2009.
12. Pasal 36 ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Ayat (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi. Ayat (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.
13. Pasal 38 Ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Ayat (2) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.
14. Wajib berarti ada sanksi, tetapi kenyataannya tidak ada sanksi.
15. Bahasa Indonesia dianggap tidak memiliki nilai jual yang baik.
16. Dukungan setengah hati dari pemerintah ditunjukkan dengan ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran.

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Laili Etika

Instansi : Universitas Muhammadiyah, Surakarta

#### **Pertanyaan:**

UU berpihak kepada bahasa asing. Pernyataan “sesuai kebutuhan” berarti sesuai dengan pengguna bahasa, memberi ruang penggunaan bahasa asing secara massal. Seharusnya ada aturan turunan yang akan memperjelas.

#### **Jawaban:**

Dalam pragmatik tidak ada tuturan yang salah. Jika semua orang sudah paham konteksnya, semua bisa dipahami.

#### **Penanya 2**

Nama : Ria Febrina

Instansi : Universitas Andalas

#### **Pertanyaan:**

Kesalahan berbahasa yang terjadi karena masyarakat tidak memedomani aturan bahasa.





**Jawaban:**

Penelitian ini tidak fokus pada kesalahan berbahasa masyarakat, tetapi lebih fokus pada instansi.

**Penanya 3**

Nama : Mahmudah  
Instansi : Universitas Negeri Makassar

**Pertanyaan:**

UU yang dibuat tanpa sanksi memperlihatkan perhatian pemerintah yang begitu minim.

**Jawaban:**

Secara umum, pemerintah paham bahwa bahasa penting. Secara struktur, UU sudah jelas keliru. Bendera dan lambang negara ada sanksi, sedangkan untuk bahasa tidak ada. Sudah waktunya UU 24 direvisi dan dimasukkan sanksi untuk UU kebahasaan. Misalnya, dalam penamaan yayasan, tidak boleh bahasa asing. Ada sanksi administratif. Izin yayasan atau perusahaan tidak keluar jika menggunakan nama asing. Bentuk sanksi ini juga bisa diterapkan untuk penamaan gedung. Pasal 36 dan 37 tetap menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa daerah dan asing boleh mendampingi. Bahasa Indonesia yang utama.

**Penanya 4**

Nama : Hadi Laksono  
Instansi : Kalimantan Tengah

**Pertanyaan:**

Mengapa belakangan ini kejayaan bahasa Indonesia tergerus?

1. Pembiasaan bahasa Indonesia nonformal lebih banyak digunakan.
2. Belum ada kebanggaan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap tidak keren.

**Jawaban:**

Sepakat dengan asumsi pembiasaan dan ketidakbanggaan. Bahasa Indonesia tidak dapat bersaing dalam lima lanskap tersebut.

**Penanya 5**

Nama : Alfian  
Instansi : Universitas Hamzan Wali, Lombok

**Pertanyaan:**

1. Nasionalisme pada era globalisasi tidak terlepas dari politik bahasa. Eksistensi bahasa Indonesia di ruang publik sangat minim. Tidak ada denda sama sekali. Mitigasi bahasa di daerah wisata. Aturan turunan dari UU perlu dibuat untuk mendukung eksistensi bahasa Indonesia. Dampak negatif pariwisata adalah adanya superioritas bahasa Inggris.
2. Apakah kajian ini memperhitungkan aspek pariwisata di Indonesia karena hal itu paling berpengaruh?

**Jawaban:**

1. Penerapan UU tidak berarti antibahasa asing, tetapi meningkatkan semangat berbahasa Indonesia. Memberi sanksi tidak berarti antiasing.
2. Pariwisata merupakan faktor utama dalam globalisasi yang mendukung minimnya eksistensi bahasa Indonesia. Solusinya adalah regulasi diperlukan dalam kondisi bahasa Indonesia yang kalah dalam lima lanskap globalisasi. Nasionalisme tidak tumbuh begitu saja, tetapi harus dipupuk. Salah satunya dengan UU.
3. Penggunaan bahasa dalam larangan: imbauan tentang kesadaran membuang sampah tidak ada, yang ada adalah larangan yang sarkastik atau larangan lucu-lucuan. Bagaimana pun, konten bahasa, santun atau tidak, mencerminkan masyarakat.

**Isu-Isu Penting:**

1. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar berkaitan dengan aspek kompetensi pengguna, keterampilan pengguna bahasa. Oleh karena itu, pengetahuan pengguna bahasa Indonesia mengenai aturan berbahasa Indonesia yang baik dan benar perlu ditingkatkan.
2. Diperlukan regulasi turunan dari UU 24 Tahun 2009 dan diperlukan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran UU tersebut.
3. Pola pengawasan lima pihak: (1) Pemda yang memberi izin, (2) masyarakat (LSM termasuk Duta Bahasa dan MGMP), (3) Badan Bahasa, (4) Ombudsman RI, dan (5) Satpol PP.



## 5. Superioritas Bahasa Asing di Ruang Publik yang Menggerus Nasionalisme Bangsa

### SUPERIORITAS BAHASA ASING DI RUANG PUBLIK YANG MENGGERUS NASIONALISME BANGSA

**Dewi Kusumaningsih**

Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo  
dewikusumaningsih71@gmail.com

#### **Abstrak**

Bahasa asing terlihat masih mendominasi ruang publik di berbagai wilayah Indonesia. Kebanggaan berbahasa asing di Indonesia menunjukkan kemunduran nasionalisme bangsa. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menunjukkan superioritas bahasa asing di ruang publik dan bagaimana kemunduran nasionalisme dilihat dari penggunaan bahasa asing di ruang publik. Pendekatan yang dipergunakan kualitatif. Data penelitian berupa satuan lingual yang berupa kata, frasa, dan kalimat yang dipakai untuk penamaan badan usaha, kawasan, dan gedung perniagaan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Surakarta. Metode pengambilan data dilakukan dengan teknik dokumentasi fotografi, catat, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% sumber data ditulis dalam bahasa Inggris. Sisanya ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, campuran bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, dan huruf Jawa. Selain itu, tampak terjadi kemunduran nasionalisme yang berkaitan dengan penggunaan bahasa asing di ruang publik. Ketidakpedulian pemilik usaha terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menunjukkan bukti kemunduran nasionalisme bangsa.

**Kata-kata kunci:** superioritas, nasionalisme, ruang publik, bahasa asing

#### **Abstract**

*Foreign language superiority indeed still exists in several Indonesian regional levels. This phenomenon had triggered public pride in applying foreign language for daily use, however, indicates the regress of nationalism. This article aims to find out the foreign language superiority used in public spaces and how it affects to the regress of nationalism. It applies a qualitative approach by taking linguistics units, including phrases, words, clauses, and sentences as the data from enterprises and companies' information published along the Slamet Riyadi Street in Surakarta. This article relies on photography, recording, and interview as the data collecting techniques. It confirms that 80 percent of the objects share information in English, while the remains use either Indonesian, Javanese or even mix the languages. The findings eventually affirm that the business owners' ignorance and disloyalty to carry out the essence of the Law No. 24 of 2009 in preserving Indonesian national language.*

**Keywords:** *superiority, nationalism, public spaces, foreign language*

#### **PENDAHULUAN**

Perubahan bahasa tidak hanya berupa pengembangan dan perluasan, tetapi dapat juga berupa kemunduran sejalan dengan perubahan yang dialami masyarakat.



Berbagai alasan sosial dan politis menyebabkan banyak orang meninggalkan bahasanya atau tidak lagi menggunakan bahasa lain. Dalam perkembangan masyarakat modern saat ini, masyarakat Indonesia cenderung lebih senang dan merasa lebih intelek menggunakan bahasa asing (Marsudi dan Zahrok, 2015; Silado, 2011). Hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan bahasa Indonesia, baik positif maupun negatif. Bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa internasional memberi pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia (Rifa'i, 2015). Akibatnya, kepopuleran bahasa Inggris membuat bahasa Indonesia tergeser pemakaiannya. Hal ini tampak, misalnya, pada keahlian berbahasa Indonesia tidak menjadi dasar pertimbangan penerimaan tenaga kerja dan lebih mementingkan keahlian berbahasa Inggris. Faktor sociolinguistik juga memengaruhi kemunduran suatu bahasa. Faktor itu, antara lain, adalah usia, pendidikan, ekonomi, dan budaya.

Globalisasi yang menjadi pandangan kemajuan berbagai bidang di setiap negara sering disalahartikan dengan penggunaan bahasa Internasional yang harus dapat dimengerti oleh berbagai bangsa. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai diberlakukan pada tahun 2015 menambah kuat posisi bahasa Inggris sebagai alat komunikasi universal. Akibatnya, bahasa Inggris menjadi primadona di semua bidang kehidupan. Berbagai sektor kehidupan “dijual” dengan bahasa Inggris sebagai pengantarnya. Alasan bahwa komunikasi internasional harus dipergunakan di berbagai bidang akhirnya membuat bahasa Indonesia kurang dipandang penting. Berbagai bidang pembangunan banyak menggunakan bahasa Inggris sebagai daya tarik. Pendidikan dipromosikan menggunakan pengantar bilingual (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia). Kurikulum yang dipakai sekolah adalah kurikulum internasional dari universitas luar negeri, pengutamaan penguasaan bahasa Inggris di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta; bidang ekonomi dengan berbagai sektornya dikemas dengan bahasa Inggris sebagai pengantarnya, misalnya, produk pabrik, produk perumahan, berbagai brosur perdagangan, bahkan sampai surat lamaran kerja berbahasa Inggris. Bidang pariwisata apalagi, sangat didominasi bahasa Inggris (<http://www.caramudahbelajarbahasainggris.net/2013/05/6-contoh-brosur-bahasa-inggris-dengan-tema-berbeda.htm>).

Penggunaan kata dan ungkapan bahasa asing di Indonesia sekarang makin meluas sejak terjadinya perubahan tatanan kehidupan dunia baru. Tatanan itu telah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan. Penggunaan kata dan ungkapan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, juga penggunaan kosakata ditemukan dalam berbagai kehidupan. Penamaan tempat usaha di ruang publik, seperti pertokoan, kantor, usaha dagang, restoran, salon, dan permukiman banyak menggunakan bahasa Inggris. Bahkan, akibat terlalu bersemangat memberi nama tempat usaha dengan bahasa Inggris, sering dijumpai kesalahan yang menggelikan (<https://www.yukepo.com/hiburan/life/13-kesalahan-bahasa-inggris-di-tempat-umum-ini-bikin-ngakak-yang-baca/>).

Penamaan dengan bahasa Inggris juga dijumpai di sepanjang kawasan perniagaan Jalan Slamet Riyadi, Surakarta. Fenomena ini patut disikapi dengan serius karena bila penggunaan kata atau istilah asing (bahasa Inggris) tersebut tujuannya untuk promosi wisata secara global (globalisasi), hal itu patutlah dimengerti. Akan tetapi, bila dilihat dari sisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009, hal ini patut menjadi pemikiran. Sebagai masyarakat pengguna bahasa Indonesia seharusnya mereka mampu berpikir kritis. Apakah konsumen yang menjadi sasaran usaha dagang tersebut adalah orang asing? Apakah



orang yang tinggal di kawasan permukiman tersebut sasarannya juga orang asing? Adakah tujuan khusus para pemilik memberi nama toko, restoran, salon, dan permukiman menggunakan bahasa Inggris? Pada makalah ini akan dibahas dua permasalahan. Pertama, bagaimana superioritas bahasa asing di ruang publik? Kedua, bagaimana nasionalisme memudar dilihat dari penggunaan bahasa asing di ruang publik?

Ruang publik yang diamati adalah Jalan Slamet Riyadi, Surakarta. Untuk menjawab permasalahan ini, peneliti mendata semua papan nama di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta. Hasil pencatatan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha yang ditemukan. Setelah semua data dari seluruh kawasan ruang publik diamati, tahap berikutnya adalah menghubungkan semua fakta dan kasus dengan fenomena nasionalisme secara global sesuai dengan dokumen yang berkaitan dengan nasionalisme.

Tujuan makalah ini adalah mengamati fakta terjadinya superioritas bahasa asing di ruang publik. Ketidakpedulian berbagai pihak dengan fenomena bahasa ini sangat miris, mengingat ruang publik yang menjadi lokasi pengamatan berada tepat di pusat kota Surakarta (Solo). Padahal, peraturan tentang penegakan pelaksanaan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik sudah dipublikasikan kepada aparaturnegara. Akan tetapi, pemakaian bahasa asing di ruang publik masih muncul.

Penggerusan nasionalisme terlihat pada kurangnya penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat dibandingkan dengan pemakaian bahasa asing di ruang publik. Bahasa bukan sekadar aset, melainkan fondasi suatu bangsa. Selain agama, suku, atau ras, bahasa dapat menjadi pengikat kebersamaan dan nasionalisme (Jalal, 2001; Kusumawardani, 2004; Rifa'i, 2015; Tilaar, 2014). Tujuan tulisan ini adalah memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwa ruang publik di Indonesia khususnya di wilayah Surakarta tetap harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, penulis ingin menumbuhkan rasa bangga pada masyarakat Surakarta, khususnya untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kebanggaan itu harus muncul dan diperlihatkan secara nyata melalui penggunaan bahasa Indonesia yang tepat.

## **LANDASAN TEORI**

Wacana adalah bahasa terlengkap yang dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, dsb.), paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap (Kridalaksana, 1993). Wijana dan Rohmadi juga menyatakan bahwa wacana merupakan satuan bahasa yang tertinggi dan terlengkap. Wacana tulis disebut dengan teks, sedangkan wacana lisan yang akan dianalisis harus dibentuk menjadi wacana teks terlebih dahulu. Analisis wacana membahas pesan atau makna yang dimaksudkan pesapa dan penyapa. Adanya pengontruksian teks bertujuan memudahkan pemahaman dalam konteks yang mendukung wacana, baik tulis maupun ujar. Analisis wacana kritis selalu mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar, situasi, dan kondisi (Wijana, 2011).

Jorgensen dan Phillips berpendapat bahwa analisis wacana bisa digunakan sebagai kerangka analisis identitas kebangsaan, yaitu memahami identitas kebangsaan dan konsekuensi yang ditimbulkan (Jorgensen, 2007, hlm. 3).



Berbagai kajian tentang bahasa dan nasionalisme sudah banyak dilakukan oleh beberapa penulis. Nasionalisme harus didukung oleh gerakan politik yang benar dan mapan karena nasionalisme sudah menjadi diri sebuah bangsa. Dalam hal ini, nasionalisme sudah masuk dalam dunia global (Spencer dan Wollman, 2002). Nasionalisme dalam perspektif bahasa sebagai perwujudan jati diri bangsa menjadi kajian utama dalam tulisan (Rifa'i, 2015). Dikatakan lebih lanjut bahwa bahasa Indonesia merupakan simbol dari nasionalisme itu sendiri. Dengan demikian, bahasa menjadi salah satu pengikat kebersamaan dan nasionalisme suatu kelompok komunitas. Kajian tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dilakukan agar bangsa Indonesia memiliki identitas yang kuat sehingga Indonesia mampu bersaing sebagai negara yang maju (Tilaar, 2014). Nasionalisme bahasa Indonesia dihubungkan dengan kompleksitas persoalan sosial dan politik diangkat sebagai suatu kajian yang menarik dari sudut pandang yang berbeda dilakukan oleh Jalal (2001).

Ruang publik sebagai objek penelitian ini mengacu pada tempat umum yang bebas dipergunakan oleh masyarakat umum. Ruang publik bisa berupa taman, jalan raya, trotoar, plaza, atau ruang terbuka lainnya. Ciri khas ruang publik, antara lain, terbuka, bisa diakses masyarakat, banyak papan petunjuk yang tertulis dengan jelas, tempat berkumpul massa. Arti ruang publik secara lebih ilmiah dikemukakan oleh Prasetyo dalam tulisannya yang menyadur hasil penelitian para ahli ke dalam enam gugus pengertian, antara lain, modal sosial (jaringan *trust* dan resiprositas), pelayanan publik (seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan, lingkungan hidup), barang publik (kebutuhan umum sebagai antisipasi kegagalan pasar), budaya publik (bahasa, sikap, selera, cara pikir *civility*), tempat publik (ruang/tempat bertemu untuk debat dan diskusi), dan interelasi antara pasar, keluarga, pemerintah, dan kelompok independen yang membentuk sosialitas masyarakat (Prasetyo, 2012).

Berbagai kajian tentang bahasa dan nasionalisme tersebut sangat relevan dengan tulisan ini sebagai daya dukung argumentasi. Akan tetapi, secara khusus kajian yang mengangkat superioritas bahasa Inggris di ruang publik secara lebih spesifik belum ada.

### **1. Pertimbangan Hukum Penggunaan bahasa Indonesia untuk Tulisan berbahasa Indonesia di Tempat Umum**

Badan Bahasa menyusun pedoman penulisan bahasa Indonesia di tempat umum, seperti dalam dunia usaha dan niaga dengan pertimbangan hal-hal berikut.

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV Pasal 36 tentang Bahasa Negara;
- b. Ketetapan MPR No. 2 Tahun 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Rencana Pembangunan Lima Tahun VI;
- e. Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1972 tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD);
- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tanggal 28 Oktober 1991 tentang Pemasayaran Bahasa Indonesia dalam Rangka Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- g. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1/U/1992 Tanggal 10 April 1992 tentang Peningkatan Usaha



Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa;

- h. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kotamadya No. 434/1021/SJ, tanggal 16 Maret 1995, tentang Penertiban Penggunaan Bahasa Asing; dan
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

## 2. Ketentuan Tulisan dalam bahasa Indonesia di Tempat Umum

Tulisan dalam bahasa Indonesia di tempat umum diatur dalam Pedoman Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009. Adapun pedoman penulisannya adalah sebagai berikut.

- a. Bahasa yang digunakan di tempat umum, seperti pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- b. Nama badan usaha, kawasan, gedung yang memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah menggunakan bahasa Indonesia.
- c. Nama asing badan usaha yang merupakan cabang badan usaha luar negeri dan nama asing merek dagang yang terdaftar dan mempunyai hak paten tetap dapat dipakai.
- d. Pada setiap nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan digunakan tulisan/huruf Latin.
- e. Pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan, jika dianggap perlu, dapat dipakai bahasa asing yang harus dituliskan di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf Latin yang lebih kecil.
- f. Penggunaan tulisan/huruf di luar tulisan/huruf Latin, jika dianggap perlu, dapat dibenarkan sepanjang untuk nama/lambang produk yang telah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Organisasi internasional yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan diplomatik negara asing dapat tetap menggunakan tulisan/huruf dan/atau bahasa asing yang ditulis di bawah nama dalam bahasa Indonesianya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah mendiskripsikan fenomena apa adanya sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Sumber data penelitian ini adalah sumber data tertulis berupa kata atau satuan lingual lain pada semua papan nama badan usaha, kawasan, gedung perniagaan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Surakarta. Kawasan tersebut dipilih sebagai daerah sumber data karena penulis melihat perkembangan daerah tersebut secara perekonomian sangat pesat, seperti pertokoan, pusat perbelanjaan, tempat beraneka macam usaha dagang, serta permukiman. Penamaan tempat-tempat tersebut menurut pengamatan penulis masih banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Contoh: *Metro Electronic Center, Royal Property and Agent Concultan, Computer Center Point, Solo Grand Mall, Home & Dekor, Money Mall, Ocean Laundry, Queen Kost, dan Arini Hotel.*



Teknik pengumpulan data dengan fotografi, yaitu pengambilan foto dengan objek semua papan nama di sepanjang kawasan Jalan Slamet Riyadi, Surakarta. Teknik baca dilakukan sebagai teknik lanjutan, yaitu dengan cara membaca semua sumber data. Pembacaan dilakukan dengan mencermati pola-pola struktur kata yang dipakai. Teknik lanjutan lainnya adalah teknik catat. Teknik ini dipakai untuk menjaring data dengan mencatat hasil pembacaan data pada kartu data. Kartu data yang dipergunakan berupa kertas HVS dan buku tulis. Catatan data penelitian tersebut selanjutnya diberi kode dan diklasifikasikan sesuai dengan kelompoknya. Penggalan informasi untuk menjawab rumusan masalah kedua tentang nasionalisme yang dihubungkan dengan bahasa dilakukan melalui teknik wawancara. Wawancara ditujukan kepada para penanggung jawab atau bagian humas dari setiap gedung yang papan namanya dijadikan sumber data. Di samping itu, dilakukan teknik observasi dokumen, yaitu mencermati dokumen akta pendirian perusahaan atau badan usaha yang menyangkut penamaan perusahaan atau badan usaha.

Data dalam penelitian tersebut akhirnya diklasifikasikan dengan tujuan mempermudah proses analisis. Adapun klasifikasi data dilakukan dengan dasar pemisahan nama macam-macam badan usaha yang meliputi usaha restoran, perbankan, kuliner, busana, selular, kesehatan, kecantikan, dan elektronik, termasuk nama kawasan seperti perumahan dan pendidikan.

Untuk menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan metode padan (Sudaryanto, 2015). Metode ini menggunakan alat penentu di luar, terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa (*langue*) yang bersangkutan. Analisis data dengan metode padan bertujuan untuk menentukan kejatian atau identitas objek penelitian (Sudaryanto, 2015). Metode padan lanjutan yang dipakai adalah metode padan referensial yang alat penentunya adalah kenyataan (*referent*) yang ditunjuk oleh bahasa itu sendiri (Sudaryanto, 2015). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah jenis struktur kata dan ungkapan bahasa Inggris yang muncul pada penggunaan nama badan usaha dan kawasan permukiman di ruang publik. Karena itu, untuk menjawab perumusan masalah yang pertama diarahkan pada jenis struktur kata yang muncul pada penamaan badan usaha dan kawasan yang berbahasa asing (Inggris). Adapun jenis struktur adalah jenis struktur kata dasar atau kata berimbuhan yang dipakai pada penamaan badan usaha dan kawasan. Di samping itu, dicermati pula pola struktur kata “diterangkan-menerangkan” (DM) yang menjadi pola lazim dalam bahasa Indonesia.

Contoh penerapannya sebagai berikut.

(1) ***Dika snack***

Data (1) dapat dipilah menjadi dua konstituen yaitu *Dika* dan *snack*. Kedua konstituen itu mempunyai identitas struktur, yaitu *Dika* menerangkan (M) dan *snack* adalah unsur diterangkan (D). Jadi, struktur tersebut mempunyai urutan MD. Pada struktur bahasa Indonesia, pola struktur kata dan frasa adalah DM (diterangkan- menerangkan). Seharusnya, sesuai dengan pedoman struktur bahasa Indonesia, penamaan usaha dagang tersebut adalah *Snack Dika*. Analisis rumusan masalah ini diarahkan pada pengindonesiaan kata dan ungkapan bahasa Inggris yang diambil dari pedoman pengindonesiaan kata dan ungkapan asing yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Jakarta tahun 2009. Contoh penerapannya sebagai berikut.

(1a) ***Snack Dika***





Nama usaha dagang tersebut harus dicari padanannya dalam bahasa Indonesia, *snack* berpadanan kata dalam bahasa Indonesia dengan *makanan ringan*. Jadi, hasil analisisnya adalah:

Data (1a) *Snack Dika* → **Toko Makanan Ringan “Dika”**

Pemberian tanda panah maksudnya ‘diubah menjadi’ dan pemberian tanda diakritik pada “Dika” bermakna judul/nama khusus.

Untuk menjawab permasalahan ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dan melakukan survei dokumen. Wawancara diarahkan sesuai dengan fokus penelitian. Konteks yang melingkupi makna tiap papan nama yang diambil sebagai data digali dari wawancara dan dikuatkan dengan eksplorasi dokumen pendukung.

## PEMBAHASAN

### 1. Superioritas Bahasa Asing di Ruang Publik

Total data yang ditemukan 47 buah. Dari 47 data, terdapat struktur data kelompok klasifikasi pertama, yaitu jenis penulisan dengan struktur bahasa Inggris menerangkan-diterangkan (M-D) yang berjumlah 36 buah. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 80% penulisan papan nama badan usaha dan gedung di sepanjang Jalan Slamet Riyadi didominasi oleh pemakaian bahasa Inggris.

Aturan penulisan papan nama badan usaha, kawasan, dan bangunan sebagaimana terdapat dalam buku *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing* terbitan Pusat Bahasa Depdiknas (2008: 6) adalah sebagai berikut.

- a. Nomor 6.3: Jika nama badan usaha, kawasan, dan bangunan menggunakan, baik nama Indonesia maupun nama asing, nama Indonesia ditempatkan di atas nama asing itu.
- b. Nomor 6.4: Nama asing yang digunakan untuk badan usaha, kawasan, dan bangunan perlu dilengkapi dengan padanannya dalam bahasa Indonesia.
- c. Nomor 6.5: Nama asing badan usaha yang merupakan cabang luar negeri dan nama asing merek dagang yang terdaftar dan memiliki hak paten tetap dapat dipakai.
- d. Nomor 8.3: Pola “diterangkan-menerangkan” adalah urutan yang lazim pada kelompok kata.

Fakta hampir 80% penulisan papan nama di ruang publik menggunakan bahasa Inggris menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap aturan kebahasaan. Berbagai penulisan yang ditulis dengan bahasa Inggris ditemukan di ruang publik, seperti pusat perdagangan, hotel, restoran, properti, toko, jasa, usaha asuransi, pembiayaan, permukiman, dan tempat kebugaran. Berikut data-datanya.

(1) Solo Square

*Square* dipadankan menjadi 1. medan; 2. petak (catur)

Jadi, jika memungkinkan *Solo Square* → Medan (Area) Solo

Akan lebih luwes dipadankan dengan, misalnya, menjadi *Area Perdagangan Solo*

(2) XL Center

*Center* dipadankan menjadi 1. Sentral; 2. Pusat.

Jadi *XL Center* → XL Sentral atau Pusat XL

(3) Relax House Steak & Burger



Pengubahan data di atas sesuai kaidah. *Relax House Staek & Burger* → *Restoran Steak dan Burger “Relax House”* atau *Restoran Steak dan Burger “Rumah Santai”*.

- (4) Milk Max  
Papan nama di atas adalah papan restoran khusus produk susu sapi maka disarankan ada keterangan sebelum nama restorannya. Pengubahan yang diusulkan:  
*Milk Max* → *Restoran Susu Segar MILK MAX*
- (5) Royal Property And Agent Concultant  
Papan nama agen konsultan perumahan maka perubahan yang disarankan adalah *Royal Property Agent and Consultant* → *Agen Konsultan Perumahan ROYAL*
- (6) Modern TCM → *Toko TCM MODERN*
- (7) Indo Putra Grup → Grup Usaha **INDO PUTRA**
- (8) Orient Restaurant → Restoran Oriental atau Restoran **ORIENT**
- (9) Computer Center Point → Sentral Penjualan Komputer
- (10) IT Mall Solo → Mal IT Solo
- (11) OGO Securitas → Agen Jaminan Keamanan **OGO**
- (12) Turndo Tour n Travel → Jasa Angkutan Wisata **TURNDO**
- (13) Arini Hotel → Hotel **ARINI**
- (14) Riyadi Palace Hotel → Hotel Riyadi Palace; Hotel Istana **RIYADI**
- (15) Hotel Anugrah Palace → Hotel Anugrah Palace; Hotel Istana **ANUGRAH**
- (16) Garden Textile Shop → Toko Tekstil **GARDEN**
- (17) Jaya Swa Motor → Toko Sepeda Motor **JAYA SWA**
- (18) Solo Grand Mall → Mal Besar **SOLO**
- (19) Roda Chiness → Restoran China **RODA**
- (20) O Solo Mio Galleria & Ristorante → Restoran dan Galeri **O SOLOMIO**
- (21) Malacca Trust  
*Trust* dipadankan dengan *kepercayaan* atau *amanat*. Biasanya dipakai dalam usaha bidang keuangan sejenis asuransi, sedangkan *Malacca* adalah nama daerah (Malaka). Maka *Malacca Trust* → Perusahaan Penjamin Kepercayaan Keuangan **MALAKA**.
- (22) Synus Refill Center → Pusat Pengisian Tinta Komputer **SYNUS**
- (23) Krisna Securitas → Agen Jaminan Keamanan **KRISNA**
- (24) BCA Finance  
*Finance* dipadankan dengan *keuangan* jadi *BCA Finance* → Lembaga Keuangan **BCA**
- (25) Beteng Trade Center → Pusat Perniagaan **BETENG**
- (26) de Solo hotel, restaurant, meeting room → Hotel, Restoran, dan Tempat Pertemuan **de SOLO**.
- (27) Solo Paragon Hotel dan Residences → Hotel dan Permukiman **SOLO PARAGON**
- (28) Hotel Indah Palace → Hotel Istana **INDAH**
- (29) McDonald’s Slamet Riyadi *Drive Thru*  
*Drive Thru* adalah suatu sistem pelayanan kepada pembeli. Pembeli langsung bisa memesan makanan dengan mengendarai mobil dan



mereka melewati loket pemesanan makanan. Jadi, McDonald's Slamet Riyadi *Drive Thru* bisa dipadankan Restoran McDonald's Slamet Riyadi: Melayani pemesanan sambil berkendara.

- (30) Armada Finance → Lembaga Keuangan **ARMADA**
- (31) Gramedia toko buku → Toko Buku **GRAMEDIA**
- (32) Ticket → Tempat Penjualan Tiket Pesawat Terbang
- (33) Batari Kencana Tour & F Travel → Jasa Angkutan Wisata **BATARI KENCANA**
- (34) Metro (Electronic Centre) → Sentral Penjualan Barang Elektronik **METRO**
- (35) Solo's Bistro restaurant → Restoran **SOLO'S BISTRO**
- (36) Traveline tour & travel → Jasa Angkutan Wisata **TRAVELINE**

Data penulisan papan nama yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang sudah sesuai aturan penulisan, seperti Toko Buku **GRAMEDIA**.

Tentang penambahan bahasa atau huruf Jawa menurut pendapat peneliti masih dapat diterima karena lokasi badan usaha tersebut terletak di Jawa Tengah, yaitu Surakarta yang dikenal sebagai tempat melestarikan budaya Keraton Solo. Salah satu langkah pelestariannya adalah dengan memublikasikan tulisan Jawa. Hal ini juga terlihat pada papan petunjuk pemerintah.

Dari data yang dikumpulkan, hanya ditemukan empat buah data yang menggunakan aturan penulisan papan nama berbahasa Indonesia yang baik.

- (1) Wisma Batari: kata *Wisma* berasal dari bahasa Indonesia. Susunan kata menggunakan hukum diterangkan-menerangkan.
- (2) Perlengkapan alat-alat olahraga Sen-Ri Sport: seharusnya kata *Sport* tidak perlu dipakai.
- (3) Galeri Batik Batari: susunan kata sudah sesuai dengan hukum diterangkan-menerangkan.
- (4) Rumah makan TIO CIU 99: struktur kata juga sudah sesuai dengan hukum D-M.

Dari paparan di atas, penulis memberikan alternatif terhadap kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Selain itu, sudah ada juga keinginan pemilik mempergunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, masih tampak kesalahan struktur, seperti penggunaan kata *palace* dan *dan*. Sebaiknya, penulis perlu pemahaman kaidah penulisan papan nama berbahasa Indonesia, termasuk penulisan yang bercampur bahasa atau tulisan Jawa, seperti *Gramedia Toko Buku; Bank BPR Sukadana; Rumah Makan Adem Ayam* (data gambar menggunakan huruf Jawa).

Fakta tersebut membuktikan bahwa superioritas bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, masih terlihat di ruang publik. Hal ini tidak terlepas dari faktor yang mengatasnamakan globalisasi. Globalisasi dipakai sebagai alasan menggunakan berbagai bahasa asing. Hal inilah yang menyebabkan kemunduran bahasa Indonesia.

## **2. Kemunduran Nasionalisme Dilihat dari Penggunaan Bahasa di Ruang Publik**

Era perkembangan dan kompetensi global yang dialami masyarakat dunia pasti memerlukan komunikasi dengan berbagai macam bahasa. Akan sulit bagi



sekelompok masyarakat masuk dalam kompetensi global apabila menggunakan satu bahasa saja. Misalnya, negara Indonesia hanya menggunakan satu bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia dalam transaksi global. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam kemajuan perekonomian. Apalagi posisi negara kita sebagai negara berkembang masih memerlukan bantuan dari negara lain. Sadar atau tidak, masyarakat sudah mulai peka terhadap globalisasi dan akhirnya menambah kemampuan diri dengan meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Tujuannya jelas untuk kesiapan dalam menyambut era globalisasi di semua sektor kehidupan. Akibatnya, melintasnya kata-kata bahasa asing dalam bahasa Indonesia seolah-olah menjadi hal yang biasa karena mengikuti perkembangan teknologi dan globalisasi (Silado, 2011).

Istilah dari bahasa asing banyak yang dipakai dalam bahasa Indonesia. Hasil pengamatan di lokasi data di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Solo, menunjukkan bahwa terdapat penggunaan bahasa Inggris di ruang publik. Selain itu, wawancara dengan warga yang melihat penggunaan bahasa tersebut juga diperlukan. Beberapa warga menjawab sebagai hal yang wajar berkaitan dengan perkembangan informasi yang begitu cepat. Penggunaan nama usaha dengan bahasa asing adalah sebuah strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan agar perusahaannya itu mudah dikenal masyarakat internasional. Demikian pula dengan iklan-iklan kreatif yang digagas pemilik usaha di internet yang dapat dengan mudah diakses masyarakat internasional. Bahkan, iklan dengan bahasa asing tersebut dapat menjadi jargon dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat mudah menggunakan dalam bahasa sehari-hari. Fenomena ini membuat masyarakat cenderung meniru bahasa komunikasi yang sedang viral dalam media sosial dan mudah diakses dengan jaringan internet. Keadaan seperti ini menunjukkan adanya keengganan pemakai bahasa Indonesia mencari padanan atau terjemahan kata-kata bahasa Inggris tersebut dalam bahasa Indonesia, seperti kata *drive thru*.

Pada zaman Orde Baru, usaha mengembalikan nasionalisme bahasa Indonesia sudah dilakukan dan ditingkatkan kembali pada era Reformasi. Bahkan, secara kuantitatif berbagai langkah kebijakan dalam pelestarian bahasa Indonesia sudah sering diterapkan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dibentuk untuk merumuskan bahasa yang baik dan benar. Berbagai kebijakan dalam skala regional dan nasional, seperti pengindonesiaan istilah asing juga telah diterapkan (Jalal, 2001; Tilaar, 2014). Tentu saja berbagai langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari masih perlu digencarkan. Sayangnya, jika tidak didukung oleh pemakai bahasa Indonesia sendiri, program-program yang menjadi kebijakan pemerintah hanya sekadar menjadi konsep program tanpa implikasi yang konkret.

## **PENUTUP**

Pengindonesiaan kata dan istilah bahasa Inggris pada data disesuaikan dengan kaidah *Pedoman Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing* yang dirumuskan oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Proses pengindonesiaan papan nama pada badan usaha, kawasan, dan bangunan menggunakan teknik penggantian dan diuraikan secara kualitatif. Kemerosotan nasionalisme dapat dilihat dari maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik. Berbagai temuan



jiwa nasionalisme dan kemerosotan nasionalisme melalui bahasa sebagai tolok ukurnya terdapat di berbagai tulisan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Jalal, M. (2001). Nasionalisme Bahasa Indonesia. *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, XIV(1), 81–92.
- Jorgensen, M. W. dan L. J. P. (2007). *Analisis Wacana Teori dan Metode*. (A. S. Ibrahim, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kridalaksana, H. (1993). *Kamus Linguistik* (3rd ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumawardani, A. dan F. (2004). Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, Tahun XII, No. 2, Desember 2004 61, XII(2), 61–72. <https://doi.org/10.22146/bpsi.7469>.
- Marsudi, M., dan Zahrok, S. (2015). Kesetiaan Berbahasa Indonesia Dipertanyakan di Era Globalisasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v8i1.1245>.
- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16 (November 2), 168–185.
- Rifa'i, A. M. (2015). Nasionalisme dalam perspektif bahasa sebagai perwujudan jati diri bangsa, 0–19.
- Silado, R. (2011). Penyakit Menular Sok-Inggris dalam Bahasa Indonesia. *Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII*, 793–801.
- Spencer, P., & Wollman, H. (2002). *Nationalism: A Critical Introduction*. London.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa* (1, Septemb ed.). Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Tilaar, H. A. . (2014). Multikulturalism, Bahasa Indonesia, dan Nasionalisme dalam Sistem Pendidikan Nasional, (November 2014), 2–12.
- Wijana, I. D. P. dan M. R. (2011). *Analisis Wacana Pragmatik Kajian Teori dan Analisis*. (Y. Kusumawati, Ed.) (3rd ed.). Surakarta: Yuma Pustaka.
- <http://www.caramudahbelajarbahasainggris.net/2013/05/6-contoh-brosur-bahasa-inggris-dengan-tema-berbeda.htm>.
- <https://www.yukepo.com/hiburan/life/13-kesalahan-bahasa-inggris-di-tempat-umum-ini-bikin-ngakak-yang-baca>.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sidang Panel Sesi 3 Ruang 4**

Pembicara : Dewi Kusumaningsih

Judul makalah : “Superioritas Bahasa Asing di Ruang Publik yang Menggerus Nasionalisme Bangsa”

Hari, tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018

Pukul : 10.15—11.45

Moderator : Dr. Felicia Nuradi Utorodewo

Pencatat : 1. Purwaningsih  
2. Ferdinandus Moses  
3. Kunkun Purwati

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Bahasa Inggris yang telah menjadi raja sebagai bahasa internasional memberi pengaruh pada perkembangan bahasa Indonesia.
2. Globalisasi yang menjadi pandangan kemajuan berbagai bidang di setiap negara, sering disalahartikan dengan penggunaan bahasa internasional yang harus bisa dimengerti oleh berbagai bangsa. MEA yang mulai diberlakukan pada tahun 2015 menambah kuat posisi bahasa Inggris sebagai alat komunikasi universal.
3. Kosakata bahasa Inggris sudah dominan pada produk perdagangan, pariwisata, seni dan budaya. Berbagai bidang pembangunan banyak menggunakan bahasa Inggris sebagai daya tarik. Pendidikan dipromosikan menggunakan pengantar bilingual (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia). Kurikulum yang dipakai sekolah adalah kurikulum internasional dari universitas luar negeri. Pengutamaan penguasaan bahasa Inggris diberlakukan di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Bidang ekonomi dengan berbagai sektornya dikemas dengan bahasa Inggris sebagai pengantarnya, misalnya, produk pabrik, produk perumahan, produk wirausaha. Berbagai brosur perdagangan bahkan sampai surat lamaran kerja berbahasa Inggris. Bidang pariwisata sangat didominasi bahasa Inggris.
4. Penggunaan bahasa Inggris dalam 80% penulisan papan nama di ruang publik di Kota Surakarta menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran aturan yang ditetapkan undang-undang. Berbagai penulisan berbahasa Inggris ditemukan mulai dari penamaan area perdagangan, hotel, restoran, properti, toko, jasa, usaha asuransi, pembiayaan, permukiman, dan tempat kebugaran.
5. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, jika tidak didukung oleh pemakai bahasa Indonesia sendiri, program-program yang menjadi kebijakan pemerintah itu hanya menjadi konsep program tanpa implikasi yang konkret.



## **Tanya Jawab**

### **Penanya 1**

Nama : Yani Pariono  
Instansi : UNS

### **Pertanyaan:**

Bahasa di ruang publik tidak hanya sekadar masalah globalisasi, tetapi juga menyangkut nasionalisme yang berkaitan dengan sikap berbahasa. Persoalan penggunaan bahasa di Solo ini bertentangan pemberian penghargaan Adibahasa. Sebaiknya penelitian ini juga dilanjutkan pada aspek tersebut.

### **Jawaban:**

Terima kasih atas masukannya. Sikap bahasa akan saya lanjutkan dalam penelitian saya.

### **Penanya 2**

Nama : Debi Sianturi  
Instansi : Aktivistis Perempuan Anti-Korupsi

### **Pertanyaan:**

Bagaimana Ibu Dewi dapat menjelaskan literasi bahasa pada anak-anak pada masa sekarang?

### **Jawaban:**

Kita sebagai orang tua harus mengikuti generasi Z, generasi anak-anak sekarang yang segala kehidupannya dipermudah melalui internet. Orang tua harus paham teknologi sehingga kita dapat menjelaskan literasi, misalnya, dengan membacakan karya sastra yang kita unduh dari internet agar anak juga jatuh cinta pada karya sastra.

### **Penanya 3**

Nama : Heri Kurniawan  
Instansi : Ikatan Jurnalis Indonesia

### **Pertanyaan:**

*Breaking news*; mengapa nama ini menjadi fenomena, mengapa tidak menggunakan “berita sela”? Apakah bahasa Indonesia itu memang tidak dibutuhkan? Jika dijatuhi sanksi, seberapa besar sanksi itu?

### **Jawaban:**

Memang harus ada keterpaksaan untuk menghadirkan kebutuhan. Mengapa mereka menggunakan bahasa asing? Karena kebutuhan ekonominya jadi terpenuhi.

### **Isu-Isu Penting:**

1. Perlu konsistensi dan dukungan politik dari pemerintah untuk menegakkan regulasi mengenai bahasa dan sastra sebagai wujud komitmen membangun manusia Indonesia seutuhnya.



2. Kosakata bahasa Inggris sudah mendominasi produk perdagangan, pariwisata, dan seni budaya. Berbagai bidang pembangunan banyak menggunakan bahasa Inggris sebagai daya tarik. Pendidikan dipromosikan menggunakan pengantar bilingual (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia). Kurikulum yang dipakai sekolah adalah kurikulum internasional dari universitas luar negeri. Pengutamaan penguasaan bahasa Inggris diberlakukan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Bidang ekonomi dengan berbagai sektornya dikemas dengan bahasa Inggris sebagai pengantarnya, misalnya, produk pabrik, produk rumahan, dan produk wirausaha. Berbagai brosur perdagangan bahkan sampai surat lamaran kerja berbahasa Inggris. Bidang pariwisata sangat didominasi bahasa Inggris.
3. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan saluran komunikasi baru dalam berbagai modus dan meningkatnya kejahatan siber serta konflik horizontal yang semakin meluas. Peran ahli bahasa sangat penting dalam menangani kasus-kasus penggunaan bahasa di media internet.
4. Superioritas bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, masih terlihat nyata di ruang publik. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mengatasnamakan globalisasi. Globalisasi akhirnya dipakai sebagai suatu alasan menggunakan berbagai macam bahasa asing yang mengganti bahasa Indonesia di semua aspek kehidupan.
5. Menjayakan bahasa dan sastra Indonesia mengandung pengertian sebagai upaya membangun manusia Indonesia berkualitas yang memiliki daya saing dan daya tawar yang tinggi dalam pergaulan global.





## 6. Bahasa Indonesia di Ruang Publik: Penggunaannya dalam Debat Publik Menjelang Pilpres 2019

### BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK: PENGGUNAANNYA DALAM DEBAT PUBLIK MENJELANG PILPRES 2019

**I Ketut Darma Laksana**  
Universitas Udayana  
darmalaksana27@yahoo.com

#### Abstrak

Makalah ini membahas bahasa Indonesia di ruang publik yang berupa debat publik. Pembahasan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pembaca tentang penggunaannya dalam acara debat umum menjelang Pilpres 2019 yang telah meresahkan masyarakat. Penggunaannya melalui pilihan kata yang mengandung fitnah, hasutan, dan ujaran kebencian dapat mengancam keutuhan bangsa. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang dibahas mencakupi (1) apa yang melatarbelakangi penggunaan bahasa yang bermakna negatif itu; (2) apa dampaknya bagi pengembangan kepribadian bangsa; dan (3) bagaimana menangkali perilaku berbahasa yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa itu. Ketiga masalah tersebut dibahas dengan menggunakan metode dekonstruksi dan metode etnografi berbahasa. Dengan menerapkan metode dekonstruksi, pembongkaran-sistem, diperoleh hasil bahwa penutur dengan “motivasi” tertentu telah melakukan pembangunan sistem dengan harapan dapat memainkan “pasar bahasa”, nilai produksi bahasa yang menandai posisi seseorang bahwa dia yang benar dan berusaha memengaruhi khalayak agar percaya pada persepsi yang dibangunnya. Sementara itu, dengan menerapkan metode etnografi berbahasa, dari tanggapan masyarakat yang bertindak sebagai “komunitas interpretif” diperoleh hasil bahwa penggunaan bahasa yang secara budaya bermakna negatif itu, yang dicontohkan oleh generasi tua, dapat merusak kepribadian generasi muda. Namun, dampak negatif itu diharapkan dapat diatasi dengan menerapkan etika berbahasa dalam bahasa daerah.

**Kata-kata kunci:** bahasa, motivasi, kepribadian, kesantunan

#### Abstract

*This paper discusses Indonesian language in public domain, especially in public debate. It is aimed at giving understanding to the readers about its use in public debate prior to Presidential Election 2019 which has made the people worried. The use of Indonesian through lexical choices that contain slander, incitement, and hate speech can threaten the unity of the nation. Therefore, the issues discussed are: (1) What is the thing behind the use of the language having negative meaning? (2) What is the impact for personal development of the nation? (3) How to avoid the use of the language that is not accordance to our national identity? Three research questions are discussed using deconstruction and ethnography of speaking methods. By applying these two methods, the results show that the speakers with a certain ‘motivation’ have created and developed new system of deviation along with the hope that they can play the ‘language market’, the value of language production making one’s position that he is right and tries to influent people in*



*order to believe in perception he has built. Meanwhile, by applying the ethnography of speaking method, the public's response that acts as 'interpretive community', it is found that the use of the language that has culturally negative meaning spoken out and modeled by old generation, can damage the young generation personality. However, it is expected that the negative impact can be handled by applying ethics in using the language, i.e. the local language.*

**Keywords:** *language, motivation, personality, politeness*

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Penggunaan bahasa dalam ruang publik, terutama menjelang Pilpres 2019, menjadi isu yang menarik, tetapi juga penuh tantangan karena menyangkut perilaku berbahasa seseorang. Penulisan makalah ini harus diawali dengan pertanyaan: apa yang dimaksud dengan ruang publik? Menurut Kuper dan Kuper (2008), konsep ruang publik umumnya digunakan untuk merujuk pada *diskursus* dan *debat publik*. Peserta yang terlibat di dalamnya bisa mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian bersama (hlm. 880). Pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia (KBI), KBI I sampai dengan KBI XI ini, lebih tepat disebut diskursus karena praktik kewacanaannya diatur oleh seperangkat konvensi yang disepakati sesuai dengan tema kongres. Bentuk diskursus dalam pelaksanaan kongres tersebut ditandai oleh pengungkapan pikiran secara formal dan teratur dengan alasan yang dapat diterima oleh umum. Meskipun berbeda-beda dalam waktu dan tema pelaksanaan kongres, masih terlihat kesamaan tujuan dalam rangka pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia agar berjaya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, diskursus yang terjadi dalam bidang sosial politik lebih didasarkan pada relasi kuasa. Oleh karena itu, diskursus yang dikendalikan oleh relasi kuasa berbeda-beda tujuannya sesuai dengan zamannya. Sebagai contoh, diskursus sosial politik pada masa revolusi bertujuan menggelorakan patriotisme rakyat untuk mencapai kemerdekaan sehingga muncul diskursus, seperti *Merdeka atau Mati, Indonesia Menggugat, Indonesia Merdeka*; masa pemerintahan Presiden Sukarno bertujuan menggugah semangat untuk menguatkan jati diri bangsa yang sudah merdeka sehingga muncul diskursus, seperti *Sekali Merdeka Tetap Merdeka, Berdiri di Atas Kaki Sendiri, Hancurkan Imperialisme dan Neokolonialisme*; dan masa pemerintahan Presiden Soeharto bertujuan membangkitkan semangat membangun manusia Indonesia secara keseluruhan, dengan diskursus, seperti *Swasembada Pangan, Pembangunan SD Inpres, dan Keluarga Berencana*. Isu-isu yang dikemukakan juga berkaitan dengan kepentingan bersama, yakni untuk kemerdekaan, harga diri, dan kemakmuran bangsa.

Diskursus dalam bidang sosial politik pada masa lampau tersebut berbeda dengan diskursus pada era Reformasi saat ini, khususnya menjelang Pilpres 2019. Meskipun diskursus yang berlangsung juga dikendalikan oleh relasi kuasa, praktik kewacanaannya lebih tepat disebut *debat publik*. Namun, debat publik yang berlangsung semata-mata bertujuan untuk kepentingan politik/golongan dengan sasaran "berebut istana" sehingga debat diwarnai dengan pertengkaran. Alasan-alasan yang dikemukakan tidak berdasarkan bukti yang kuat atau tidak masuk akal. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dinyatakan bahwa debat yang demikian disebut sebagai *debat kusir* (Pusat Bahasa, 2012, edisi IV, hlm. 301).



Era Reformasi yang ditandai kebebasan berpendapat sering disalahtafsirkan oleh kelompok tertentu. Penggunaan bahasa Indonesia oleh pelibat dalam acara debat sungguh melanggar etika berbahasa yang hidup di masyarakat yang berpegang teguh pada kesantunan. Penggunaan kata-kata dengan tujuan memfitnah, menjelek-jelekkan, menghina, dan menyebarkan kebencian tentu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Hal inilah yang ditengarai dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Steinhauer (2003) bahwa “bahasa yang dimiliki bersama tidaklah menjamin kerukunan sosial; makin banyak orang mengerti hasutan, makin rawan masyarakatnya. Namun, orang yang fasih berbahasa bisa bertengkar mulut, sedangkan orang yang kehilangan kata tinggal baku hantam saja” (hlm. 5).

Hal tersebut di atas menjadi alasan pentingnya pemikiran yang dituangkan dalam makalah ini. Masyarakat umum perlu diberikan pemahaman betapa pentingnya hakikat sebuah bahasa karena dari bahasalah tecermin kepribadian suatu bangsa. Karena ulah orang-orang tertentu, kepribadian bangsa dapat tercoreng oleh perbuatan warganya sendiri. Bukankah ada peribahasa yang berbunyi *Bahasa menunjukkan bangsa*, suatu bangsa dapat dikenali dari bahasanya.

## 2. Masalah

Debat publik menjelang Pilpres 2019 yang kental muatan politik itulah yang dipertontonkan oleh pelibat ke khalayak ramai dengan cara yang tidak terpuji. Penggunaan kata-kata, seperti *pengibulan*, *proasing*, *ganti presiden*, *partai Allah*, *partai setan*, dan sejenisnya jelas mengandung hasutan, fitnah, atau ujaran kebencian karena dilontarkan tanpa alasan yang masuk akal. Sehubungan dengan itu, makalah ini membahas permasalahan sebagai berikut.

- a) Apa yang melatarbelakangi individu dalam penggunaan bahasanya?
- b) Apa dampaknya bagi pengembangan kepribadian bangsa?
- c) Bagaimana menangkal etika berbahasa yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa?

Masalah (1) bersangkutan dengan alasan/motivasi yang mendasari partisipan debat dalam penggunaan bahasanya. Masalah (2) bersangkutan dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh penggunaan bahasa yang cenderung memecah belah persatuan bangsa. Sementara itu, masalah (3) berkenaan dengan model yang dapat digunakan yang bersumber dari dua bahasa dan/atau budaya Jawa dan Bali.

## 3. Tujuan

Pertikaian politik berdampak negatif bagi generasi muda yang sudah terlihat saat ini. Bagaimana tidak, sekelompok mahasiswa, sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah berani melontarkan hasutan dengan mengacungkan “kartu kuning” dan “kartu merah” yang ditujukan kepada Presiden (*Kompas TV*, Medio April 2018). Mereka sudah termakan oleh isu negatif yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat di DPR atau tokoh politik tertentu di masyarakat. Inilah pengaruh buruk yang diciptakan oleh generasi tua dan tanpa penerangan yang baik telah merasuk ke dalam benak mahasiswa. Karena ulah segelintir mahasiswa dan elite politik tersebut, reaksi pemuda Papua yang “membela” Presiden dapat dilihat pula di *YouTube*. Masyarakat sudah terbelah antara yang “pro” dan yang “kotra” calon presiden petahana/pemerintah. Hal itu sudah terlihat sekarang.



Berdasarkan kenyataan tersebut, makalah ini bertujuan:

- a) melakukan pembongkaran-sistem atas sistem yang dibangun oleh peserta debat;
- b) melihat dampak negatif debat yang etika bahasanya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa; dan
- c) menyusun formula yang dapat dijadikan instrumen dalam membentuk kepribadian bangsa yang santun.

#### 4. Urgensi

Makalah ini disusun berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam debat publik, terutama pilihan kata-katanya, yang melanggar kesantunan berbahasa. Kata-kata yang bermakna ‘menghasut’ akan berpengaruh besar pada stabilitas sosial kemasyarakatan. Pemerintah yang sedang berkonsentrasi pemeratakan pembangunan di seluruh tanah air terganggu oleh hiruk-pikuk perdebatan yang tidak dilandasi oleh pemikiran yang sehat. Kondisi perpolitikan yang sekarang berkembang, yang ditengarai sebagai “memperebutkan istana”, mendapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa sistem kebahasaan yang dibangun oleh politisi sarat dengan kepentingan politik/golongan dengan menghalalkan berbagai cara.

Sesungguhnya, cara yang bermartabat dalam menyampaikan kritikan dapat tetap dijaga dengan becermin pada kepribadian bangsa, yang dikenal dengan kesantunannya. Dengan demikian, keutamaan pemikiran yang dituangkan dalam makalah ini ialah dalam upaya peneguhan kepribadian bangsa dengan menyodorkan formula yang diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengubah perilaku berbahasa yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan mengacu pada kesantunan dalam bahasa daerah Jawa dan *Bali* diharapkan perilaku berbahasa yang “menyimpang” dapat diluruskan ke arah yang lebih baik.

#### 5. Tinjauan Pustaka

Halliday dan Hasan (1985) menyatakan bahwa untuk memahami suatu tuturan seseorang harus memperhatikan tiga hal berikut: (1) apa yang dibicarakan (*field*), (2) siapa yang menjadi partisipan dalam komunikasi (*tenor*), dan (3) bagaimana cara menyampaikan pesan (*mode*) (hlm. 25). Pandangan ini dapat dipakai untuk mengkaji bentuk, makna, dan fungsi tuturan yang digunakan dalam debat publik yang berlangsung saat ini. Hal yang dibicarakan berkaitan dengan dunia perpolitikan Indonesia menjelang Pilpres 2019. Kemudian, partisipan dalam debat terbelah menjadi yang “pro” dan yang “kontra” pemerintah. Sementara itu, dalam penyampaian gagasan, partisipan menggunakan bahasa Indonesia dengan pilihan kata yang dapat menyudutkan lawan politik.

Kosakata umum yang digunakan oleh peserta debat terdapat dalam kamus, seperti *KBBI* (Pusat Bahasa, edisi IV, 2012), yang menyediakan definisi makna kata, baik yang bersifat literal maupun yang bersifat kias, yang dapat dipilih oleh pemakai bahasa sesuai dengan konteks dan situasi. Selain kosakata umum, menurut Wardhaugh (1986), penggunaan kata-kata sapaan dapat menandai posisi sosial seseorang (hlm. 252). Hal ini juga dapat dilihat penggunaannya dalam debat publik yang dikaji dalam makalah ini. Jadi, pencitraan diri tokoh sangat penting dilakukan oleh peserta debat dengan cara memberdayakan unsur-unsur bahasa sesuai dengan kepentingan.



Pembicaraan mengenai kesantunan berbahasa menjadi sorotan masyarakat setelah menyaksikan penggunaan bahasa dalam debat publik yang berlangsung menjelang Pilpres 2019. Sehubungan dengan itu, penting ditinjau beberapa kepustakaan yang berbicara tentang kesantunan berbahasa, yaitu sebagai berikut. Duranti (1997) menyatakan bahwa bahasa, termasuk dalam hal ini kesantunan, merupakan sumber daya kultural dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan praktik berbahasa (hlm. 2). Namun, dalam debat publik menjelang Pilpres 2019 terdapat kesenjangan yang lebar antara bahasa sebagai sumber daya kultural dan bahasa sebagai praktik berbahasa tersebut.

Kemudian, Salzmann (1998) menyatakan pula bahwa kesantunan (*politeness*) merupakan wujud praktik berbahasa itu, sebagaimana dicontohkannya dalam bahasa Jepang. Dalam masyarakat Jepang kesantunan berbahasa tetap bertahan. Hal ini terjadi karena generasi tua mewariskan budaya leluhurnya kepada generasi muda (hlm. 195-196). Akan tetapi, dalam masyarakat Indonesia—demi kepentingan politik tertentu—diharapkan kejadian ini berlangsung sesaat, penyimpangan kesantunan bahasa telah memberi citra yang buruk bagi bangsa. Generasi tua seharusnya memberikan teladan yang baik kepada generasi muda, bukan sebaliknya, teladan yang buruk.

Namun, masih ada upaya mengatasi kondisi yang ditimbulkan oleh pergolakan politik saat ini. Sehubungan dengan itu, etika bahasa dalam bahasa daerah dapat diterapkan dalam membentuk kesantunan berbahasa seseorang. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa etika bahasa dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Jawa dan Bali, dapat dipakai contoh tentang kesantunan berbahasa. Kedua bahasa tersebut telah dikaji secara luas oleh para ahli dan pemerhati mengenai hubungan bahasa dengan kebudayaan, seperti yang disajikan di bawah ini.

Dalam artikelnya, Gonda (1975) mengkaji kosakata bahasa Jawa, yang berhubungan dengan “ketakziman”, bahwa pemakaian kedua varietas bahasa “alus-kasar” (*kromo-ngoko*) tidak sekadar berkaitan dengan fenomena tabu (larangan), tetapi lebih dari itu, yakni kebutuhan akan komunikasi dalam masyarakat Jawa yang mengenal kesantunan berbahasa. Selanjutnya, Gonda menyatakan bahwa bentuk-bentuk bahasa yang bersifat kolokial berdasarkan kebiasaan dan tata krama dilarang digunakan oleh penutur jika ia menyapa orang lain yang lebih tinggi status atau kedudukan sosialnya. Akan tetapi, penutur yang status atau kedudukan sosialnya lebih tinggi menggunakan bentuk bahasa yang bersifat kolokial tersebut (hlm. 333). Pandangan mengenai perbedaan penggunaan *undak usuk* itu mungkin perlu dipertimbangkan. Maksudnya, apa pun perbedaan sosialnya, demi saling menghormati, tidak ada salahnya bila orang yang lebih tinggi kedudukan sosialnya berbahasa *kromo* pula terhadap mitra tuturnya yang lebih rendah kedudukan sosialnya. Namun, bila terdapat kesepahaman dalam komunikasi yang menyangkut *kromo-ngoko* tersebut tentu tidak menimbulkan masalah.

Terkait dengan masalah kesantunan, Geertz (1975, hlm. 167) mengemukakan bahwa bahasa Jawa mengenal *undak usuk* bahasa, yaitu *kromo* dan *ngoko*. Masyarakat penuturnya tetap mempertahankannya sebagai kontrol sosial dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa pada dasarnya apa yang rumit ialah bahwa orang Jawa memolakan perilaku ujaran mereka dalam kaitannya dengan halus-kasar berpangkal di sekitar perilaku sosial yang mereka bangun pada umumnya. Seseorang yang berbicara dengan mitra tutur yang statusnya lebih tinggi



(superior), misalnya, priayi atau pejabat, akan menggunakan bahasa *kromo*. Sebaliknya, seseorang yang berbicara dengan mitra tutur yang statusnya lebih rendah (inferior), yang disebut abangan, akan menggunakan bahasa *ngoko*.

Poedjosoedarmo (1986, hlm. 67) juga berbicara tentang tingkatan-tingkatan bahasa (*speech levels*) dalam bahasa Jawa. Tingkatan-tingkatan bahasa itu menunjukkan sikap penutur terhadap mitra tuturnya. Poedjosoedarmo menyatakan, pada dasarnya tingkatan bahasa itu dibedakan atas tiga jenis. *Ngoko* merupakan level sikap sosial yang tak bermarkah (*unmarked*). Sikap ini menunjukkan kedekatan dan tidak formal. *Krama* adalah tingkat bahasa formal dan santun. *Madya* adalah tingkat bahasa yang bersifat semi-formal.

Akan tetapi, pandangan terakhir yang diperoleh (M. Wajdi, komunikasi pribadi, 14 Mei, 2013) menyebutkan bahwa *undak usuk* bahasa Jawa lebih sederhana daripada apa yang dikemukakan oleh Poedjosoedarmo di atas karena perkembangan masyarakat dewasa ini menghendaki kemudahan dalam berkomunikasi, tetapi tetap mempertahankan hakikat kesantunan dalam masyarakatnya. Di bawah ini disajikan beberapa contoh penggunaan *ngoko-kromo* dalam bahasa Jawa (dikutip dari Geertz, 1974, hlm. 167).

(1) *Penjenengan saking tindak pundi (kromo)*

(2) *Kowe saka endi (ngoko)*

(Artinya: 'Engkau datang dari mana?')

Kalimat (1) diucapkan oleh seorang dari status sosial yang lebih rendah (inferior) terhadap orang lain yang status sosialnya lebih tinggi (superior). Sebaliknya, kalimat (2) diucapkan oleh seorang dari status sosial yang lebih tinggi (superior) terhadap orang lain yang status sosialnya lebih rendah (inferior).

Sementara itu, dalam bahasa Bali, Laksana (2009, hlm. 51), yang mengutip pandangan I Gusti Ngurah Bagus dalam disertasinya (1979) tentang pemakaian bentuk hormat dalam bahasa Bali, menyatakan ihwal kesantunan bahasa atau bentuk hormat dalam bahasa Bali juga tetap bertahan dalam praktik berbahasa masyarakatnya. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa kejadian yang memalukan pernah terjadi tahun 1970-an. Akibat pelanggaran kesantunan bahasa terjadi pertengkaran penutur antarkasta di Bali. Penggunaan *undak usuk* yang dikenal dalam masyarakat Bali dengan istilah *alus* dan *lumrah* berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam hal ini perbedaan kasta (Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra).

Kersten (1984, hlm. 16) menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat beradab, orang menyesuaikan bahasanya kepada kedudukan orang yang diajak berbicara atau pun kepada kedudukan orang yang dibicarakannya. Jika orang Bali berbicara kepada seseorang yang sama atau lebih rendah kedudukannya serta rapat pergaulan dengannya, ia tidak memilih-milih kata: bahasanya biasa saja. Jenis bahasa itu sering disebut bahasa kasar, tetapi bahasa itu sedikit pun tidak kurang sopan jika dipergunakan dalam pembicaraan yang menyangkut kesetaraan dan keakraban. Sebaliknya, bahasa hormat digunakan jika seseorang berbicara kepada orang yang hendak dimuliakannya, ia menggunakan kata-kata halus, sejauh ada. Jika tidak ada kata halus, ia menggunakan bahasa biasa. Bandingkan dua kalimat bahasa Bali berikut.

(3) I Kelor *nyedayang* Anake Agung. (bahasa halus)

'Kelor membunuh Anak Agung.'

(4) Anake Agung *ngamatiyang* I Kelor. (bahasa biasa)

'Anak Agung membunuh Kelor.'



Kata *nyedayang* ‘membunuh’ pada (3) digunakan untuk orang yang lebih tinggi kastanya. Sementara itu, kata *ngamatiyang* pada (4) digunakan untuk orang yang lebih rendah kastanya.

Dengan pemahaman yang sama, Tinggen (1995) mengemukakan bahwa *undak usuk* bahasa Bali disebut *sor singgih*, penting dipahami oleh masyarakat Bali yang mengenal stratifikasi sosial. Dampak dari ketidakpahaman seseorang akan *undak usuk* bahasa itu tidak jarang menimbulkan ketersinggungan antarpemut. Sama seperti apa yang dikemukakan di atas, pertentangan antarkasta tersebut menyulut polemik tentang pentingnya *undak usuk* itu dipertahankan.

Foley (1997, hlm. 327), dalam pembicaraannya mengenai kesantunan bahasa, memberikan perhatian pada bahasa Bali dengan menggunakan contoh *undak usuk* dalam bahasa yang bersangkutan. Kesantunan (*politeness*) dalam berbahasa itu berfungsi menjaga keharmonisan hubungan sosial pemut. Perbedaan penggunaan *undak usuk* dalam bahasa Bali dapat dilihat pada contoh berikut.

(5) Pekak Putu *lakar was* kija? (*lumrah*)

‘Kakek Putu akan pergi ke mana?’

(6) Titiang *jagi lunga* ke pasar. (*alus*)

‘Saya akan pergi ke pasar.’

Kalimat (5) diucapkan oleh seseorang yang kastanya yang lebih tinggi (Brahmana: *Ida Bagus*) terhadap orang lain yang kastanya rendah (Sudra: *Pekak Putu*): penggunaan kata *lakar* ‘akan’ dan *was* ‘pergi. Sebaliknya, kalimat (6) diucapkan oleh seorang Sudra terhadap seorang Brahmana: penggunaan kata *jagi* ‘akan’ dan *lunga* ‘pergi’.

Kedua bahasa daerah tersebut, bahasa Jawa dan Bali, memang memperlihatkan kesamaan sejarah masa lampau. Tingkatan bahasa *alus* dan *lumrah* dalam bahasa Bali merupakan percampuran budaya Jawa. Hal penting yang perlu dicatat dari kedua bahasa daerah tersebut ialah bahwa terdapat pandangan yang sama dalam menghadapi orang lain sebagai mitra tutur. Pada orang Jawa dikenal pandangan “lebih baik menghargai orang lain daripada menghargai diri sendiri”. Sementara itu, pada orang Bali dikenal pandangan yang dinamakan *Tat Twam Asi*, artinya, ‘Aku adalah engkau, Engkau adalah aku’, jika orang berbicara santun, dibalas dengan santun pula.

Kedua contoh etika berbahasa tersebut dapat diterapkan dalam menciptakan kesantunan berbahasa sekalipun dalam konteks politik. Dengan demikian, inti dari sumbangan etika bahasa dalam bahasa daerah adalah penerapan “pengalaman” belajar bahasa daerah mengenai kesantunan berbahasa, khususnya dalam komunikasi publik, dalam hal ini bahasa Indonesia sebagai medianya.

## LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut. *Pertama*, teori Pos-Strukturalisme atau disebut juga Pos-Modernisme, dengan tokoh-tokohnya, seperti Derrida, Foucault, Bourdieu, Iser, dan Fish. Teori yang dikembangkan oleh tiap-tiap tokoh tersebut memiliki kesamaan metodologis. *Metode dekonstruksi* yang menjadi karakteristik analisis data teori Pos-Strukturalisme digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembongkaran-sistem atas sistem yang dibangun dalam wacana politik yang berupa debat publik. Di bawah ini disajikan pandangan mereka satu per satu.



Derrida (2008, hlm. 64--65) menolak pandangan teori Strukturalisme dari Saussure (1988) mengenai hubungan antara penanda dan petanda yang sepenuhnya bersifat arbitrer dan murni bersifat sintaktis-formal. Menurut Derrida dalam Sim dan van Loon (2008, hlm. 88--89) (lihat juga Lubis, 2014, hlm. 38--39), hubungan antara kata dan maknanya memungkinkan adanya “motivasi” oleh pemakai bahasa. Dengan kata lain, makna sebuah kata bergantung pada penggunaan atau konteksnya. Namun, pandangan Saussure masih dapat digunakan untuk melihat bahwa dalam “struktur kalimat” makna sebuah kata ditentukan oleh makna kata lainnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari dua kalimat bahasa Inggris, yang dikutip dari Duranti (1997, hlm. 327) sebagai berikut.

(7) I can't draw a straight *line* without ruler

(8) People must form a *line* if they want to be served

Dalam kalimat (7) dan (8), makna kata *line* ditentukan oleh kata yang mendahuluinya: *draw* pada (7) dan *form* pada (8). Akan tetapi, pandangan dalam teori Strukturalisme tersebut tidak bisa digunakan untuk mencari “motivasi” di balik penggunaan kata.

Dalam dekonstruksi, analisis diarahkan dari pembangunan-sistem ke pembongkaran-sistem. Pembongkaran sistem menghasilkan “motivasi” pengguna bahasa untuk menjatuhkan lawan dengan melakukan hasutan, fitnah, atau ujaran kebencian. Di sini, pengguna bahasa, menurut Bourdieu (dalam Lubis, 2014, hlm. 117), telah memainkan apa yang disebutnya “pasar bahasa”, yakni upaya seseorang untuk mengambil keuntungan pribadi/golongan sehingga dapat membentuk status/posisinya sebagai seseorang yang benar dan pantas dicontoh. Debat publik seperti yang berlangsung saat ini mengandung “epistem”, yaitu struktur pemikiran tertentu mengenai keseluruhan nilai yang menyatukan praktik diskursif, pada suatu masa, yang memunculkan pola-pola epistemologis (Foucault, 2016, hlm. 402; Lubis, 2014, hlm. 69).

Pembongkaran-sistem yang telah dilakukan atas pembangunan-sistem dan kembali dilakukan “pembangunan-sistem” oleh peneliti berupa penguatan kembali sistem yang telah berlaku dalam masyarakat. Namun, apabila terdapat inovasi, dalam hal ini kesantunan berbahasa, misalnya, penggunaan kata *sampeyan* dalam bahasa Jawa untuk menyapa orang yang diajak berbicara ketika berbahasa Indonesia, terjadilah sebuah revitalisasi kesantunan dalam bahasa Indonesia.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan bahasa dalam debat publik dapat digali dengan mengacu pada pandangan Iser dan Fish (dalam Sim dan van Loon, 2008, hlm. 84--85) dalam Teori Resepsi, disebut juga Teori Respons-Pembaca, yang berkonsentrasi pada keterlibatan/interaksi pembaca dengan teks/wacana yang disampaikan. Makna tekstual dipandang dapat hadir dari keterlibatan pembaca dan teks, dengan penekanan bahwa pembaca sepenuhnya bertanggung jawab atas ciptaan maknanya. Tokoh Teori Respons-Pembaca tersebut memandang pembaca merupakan seorang anggota dari “komunitas interpretif” karena nilai-nilai dari setiap anggotanya memengaruhi pembacaan individual sebagaimana hal itu akan memberikan sebuah kriteria untuk menilai validitasnya.

Dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa yang bersifat menghasut, menghina, dan membohong, pemahaman pembaca mencapai validitasnya karena mereka hidup dalam budaya yang sama. Secara etnografis, mereka merupakan pendukung budaya daerah yang dikenal dengan kesatuan bahasanya. Mereka juga pendukung bahasa Indonesia yang mengerti kata-kata yang mengandung hasutan,





fitnah, atau ujaran kebencian. Pandangan Teori Respons-Pembaca tersebut dapat mengungkap “motivasi” yang melandasi penggunaan bahasa dalam debat publik menjelang Pilpres 2019 yang sedang berlangsung saat ini.

*Kedua*, Teori Linguistik Antropologi/Antropologi Linguistik diacu untuk mengkaji hubungan antara bahasa dan kebudayaan. Benjamin Lee Whorf, sebagaimana yang dikutip oleh Salzman (1998, hlm. 42), menyebutkan bahwa cara berpikir seseorang tecermin dalam bahasa yang digunakan. Berkaitan dengan pandangan tersebut, bahasa daerah yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dianggap dapat memengaruhi penutur dalam penggunaan bahasa Indonesianya. Sebagai masyarakat “dwibahasawan”, penutur yang menggunakan bahasa Indonesia diharapkan dapat menerapkan pengalaman beretika bahasa dalam bahasa daerah mereka yang mengenal kesantunan berbahasa. Dengan demikian, penerapan kesantunan berbahasa dalam bahasa daerah menjadi dasar pembentukan kepribadian bangsa secara keseluruhan.

Sehubungan dengan itu, menurut Harris (1991, hlm. 273), setiap individu sesungguhnya memiliki apa yang dinamakan “struktur kepribadian dasar” yang tecermin dalam kesantunan berbahasa yang dapat dijumpai pada setiap anggota masyarakat. Jika populasi yang tercakup diorganisasikan ke dalam suatu negara/bangsa, struktur kepribadian dasar itu disebut *karakter bangsa/nasional*. Jadi, dalam konteks budaya, kesantunan yang dimiliki bersama oleh masyarakat Indonesia merupakan karakter bangsa Indonesia.

Pandangan Duranti (1997) di atas mengenai hubungan antara bahasa dan kebudayaan penting untuk dicermati, yakni mengenai penerusan kesantunan bahasa sebagai sumber daya kultural. Orang-orang dari kelompok masyarakat tertentu kemungkinan gagal atau tidak mau mempraktikkan sumber daya kultural itu dalam praktik berbahasa. Penerusannya dari satu generasi ke generasi berikutnya akan menjadi tolok ukur bagi keseimbangan budaya dalam suatu masyarakat madani seperti Indonesia. Oleh karena itu, sumber persoalannya harus dicari apakah generasi tua sudah memberikan keteladanan yang baik atau buruk mengenai kesantunan berbahasa itu kepada generasi muda.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data lisan yang bersumber dari tayangan debat publik Pilpres 2019 di televisi dan media *online* (*YouTube*) periode Januari sampai dengan medio Mei 2018. Sementara itu, data tulisan diambil dari surat kabar (*Kompas*), kamus bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV, 2012), kamus bahasa Bali (Kersten, *Bahasa Bali: Tata bahasa dan Kamus Lumrah*, 1984), dan hasil penelitian dalam bahasa Jawa (Poedjosoedarmo, Seri *NUSA* vol. 24, 1986). Kedua jenis data tersebut dikutip dengan menuliskannya pada kartu (teknik catat) untuk memudahkan tahap analisis data.

Namun, dalam upaya mengetahui “permainan makna” kata-kata dari pengguna bahasa dalam debat yang dianggap menyimpang dari pemahaman umum pemakai bahasa Indonesia, dilakukan pula wawancara terhadap sepuluh narasumber yang dijumpai secara kebetulan. Bersama peneliti, mereka diperlakukan sebagai instrumen penelitian dalam pengumpulan data yang bertindak sebagai “komunitas interpretif” dalam memaknai kata-kata yang digunakan dalam debat.



Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan metode dekonstruksi. Melalui metode dekonstruksi dapat dipahami bahwa pengguna bahasa berusaha menyimpangkan makna. Dengan cara seperti itu, ia berharap dapat memenangkan kontestasi dalam Pilpres 2019 yang akan datang.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan interpretasi atas penggunaan bahasa Indonesia melalui pilihan kata yang bersifat negatif tersebut, permasalahan yang diajukan dalam makalah ini akan dibahas dalam subbagian-subbagian berikut.

### 1. Motivasi Individu dalam Penggunaan Bahasanya

Berdasarkan pembongkaran-sistem terhadap sistem yang dibangun oleh pelibat dalam debat publik yang berlangsung saat ini diperoleh hasil yang berikut.

Data:

- (9) Pembagian sertifikat tanah adalah *pengibulan*.
- (10) Indonesia akan *bubar* tahun 2030.
- (11) Partai *Allah* dan partai *setan*.

Makna kata-kata *pengibulan*, *bubar*, *Allah*, dan *setan* seperti yang tercantum dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, edisi IV, 2012) bersifat “netral”, yakni merujuk pada makna denotatif. Namun, dalam konteks atau penggunaannya, seperti contoh di atas, kata-kata tersebut sudah terbuka maknanya untuk hal yang lain, makna konotatif. Dengan kata lain, penggunaannya telah “dimotivasi” oleh kepentingan politik tertentu. Penggunaannya juga dilatarbelakangi oleh kepentingan individu dengan memainkan “pasar bahasa” dengan tujuan menciptakan status/posisi tawar dalam kontestasi perebutan kekuasaan dalam Pilpres 2019.

Pembaca atau penonton dalam debat publik tersebut memiliki peran sebagai “komunitas interpretif”, mereka bisa memberikan respons apakah penggunaan bahasa oleh pelibat debat positif ataukah negatif. Kenyataan menunjukkan bahwa dari sepuluh responden yang dijumpai secara kebetulan semua menyatakan bahwa kata-kata yang digunakan, seperti pada data (9), (10), dan (11) secara kontekstual tergolong kata-kata yang bermakna negatif. Pemahaman mereka berdasarkan konteks situasi saat ini bahwa para politisi yang berdebat itu mempunyai agenda tertentu untuk memenangkan golongannya. Dengan demikian, kenyataan memang menunjukkan telah terjadi polarisasi masyarakat menjelang Pilpres 2019.

Berita yang bertajuk “Langkah Maju Jokowi” yang ditulis oleh Gutomo Bayu Aji (*Kompas*, 18 April 2018, hlm. 6) telah membantah sindiran yang mengatakan bahwa program sertifikat tanah sekarang sebagai reformasi agraria *ngibul*. Walaupun memicu polemik, sindiran itu kurang memperlihatkan kontribusi diskursif terhadap pemikiran serta kebijakan reformasi agraria. Baik kritik maupun penjelasan pada polemik itu kurang menyentuh substansi diferensiasi agraria yang menciptakan jurang ketimpangan. Selain itu, polemik juga tidak menyentuh strategi politik reformasi agraria sebagai suatu “gebrakan cepat”. Namun, kata *ngibul* atau *pengibulan* sendiri perlu dicocokkan dengan penjelasan maknanya yang terdapat di dalam kamus.

Kata *kibul*, *mengibul* berarti ‘berbohong; membohong’. Kemudian, *pengibulan* berarti ‘proses, cara, perbuatan mengibul’ (Pusat Bahasa, edisi IV, 2012, hlm. 696). Berdasarkan penjelasan makna ini dan ulasan yang termuat dalam harian *Kompas*



itu, penggunaan kata *pengibulan* dalam konteks kalimat (9) jelas mengandung ‘kebohongan/fitnah’ yang dibuat oleh lawan politik.

Kata *bubar* berarti ‘bercerai berai; selesai; usai’ (Pusat Bahasa, edisi IV, 2012, hlm. 213). Dalam kalimat (10) tersebut, seseorang bermaksud melontarkan sindiran kepada pemerintah, tanpa bukti atau alasan yang masuk akal. Respons yang disampaikan oleh pihak istana adalah bahwa “kritikan” itu tidak berdasarkan bukti sama sekali. Justru Indonesia akan mencapai puncak “keemasan” pada tahun 2045. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam kalimat (10) itu juga merupakan “berita bohong” (*hoax*).

Selanjutnya, kata *Allah* dan *setan* masing-masing mengandung makna sebagai berikut. *Allah* berarti ‘nama Tuhan dalam bahasa Arab; pencipta alam semesta yang Mahasempurna; Tuhan Yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman’ (Pusat Bahasa, edisi IV, 2012, hlm. 42). Sementara itu, *setan* berarti ‘roh jahat (yang selalu menggoda supaya berbuat jahat)’ (Pusat Bahasa, edisi IV, 2012, hlm. 1294). Kalimat (11) juga digunakan oleh seseorang untuk menyindir lawan politiknya. Penutur bermaksud mengatakan bahwa partai mana yang sehaluan (sekoalisi) dengan partainya adalah partai orang-orang yang beriman, sedangkan partai lainnya yang tidak sehaluan adalah “partai setan”. Dapat diterka apa reaksi partai yang disebut “partai setan” itu: Kami beragama, menyembah Allah, pencipta alam semesta sama seperti Anda. Yang mengetahui tentang “partai Allah” adalah Allah sendiri. Ketua umum sebuah partai (*YouTube*, Mei 2018) menyarankan agar orang yang menyebar fitnah tersebut bisa menggunakan diksi yang benar karena sindiran yang disampaikannya mengandung ujaran kebencian (*hate speech*). Kebohongan dan ujaran kebencian mengandung “motivasi” pelaku debat sebagai strategi untuk memenangkan pertarungan dalam Pilpres 2019.

## 2. Dampak Negatif Penggunaan Bahasa

Acara debat yang berlangsung di *Kompas TV* (Senin, 26 April pukul 09.00 WITA) bertajuk “Riuh Polarisasi Masyarakat Jelang Pilpres 2019” sudah menandai bahwa masyarakat terbelah antara yang propemerintah dan yang kontrapemerintah. Perseteruan tidak saja terjadi di tingkat elite partai, tetapi juga menyentuh akar rumput. Banyak orang yang kontrapemerintah menyuarakan “permusuhan”. Perhatikan, misalnya, adanya perang tagar (tanda pagar: #) dan debat kusir jelang Pilpres 2019. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah “Siapa yang memulai?”. Pilpres yang akan berlangsung tahun 2019 dari sekarang orang sudah menabuh “genderang perang”. Perhatikan contoh di bawah ini.

- (12) #Tahun 2019 Ganti presiden
- (13) Rakyat menginginkan presiden baru
- (14) Presiden kita mestinya seperti Putin

Contoh-contoh di atas menggambarkan kenyataan bahwa telah terjadi pertarungan politik di negara kita yang semakin panas dan tidak bermoral, lebih “keras” dari Pilpres 2014. Petinggi partai tertentu yang berseberangan dengan pemerintahlah yang membuat ulah seperti itu. Tokoh partai tersebut juga pantas disebut sebagai “biang” perpecahan antarwarga masyarakat. Ada tokoh politik tertentu yang secara vulgar mempertontonkan di ruang publik baju kaos yang bertuliskan “Ganti Presiden 2019” (12) dan “Rakyat menginginkan presiden baru” (13), serta ada tokoh yang menginginkan “Presiden kita semestinya seperti Putin” (Presiden Rusia) (14).



Apa reaksi dari lawan politik mereka. Belum apa-apa sudah ganti presiden: dengan baju kaos lagi, tidak dengan adu visi dan misi (program). Kemudian, mengapa mesti seperti Putin, Indonesia bukan negara komunis. Jadi, demi ambisi politik/golongan orang bisa berbuat sesuka hatinya. Kebebasan sering disalahtafsirkan oleh orang-orang tertentu. Orang bijak mengatakan, “Hati manusia memang dapat dikembalikan pada kodratnya: yang baik dan yang buruk”. Namun, masih beruntung bangsa ini masih memiliki banyak tokoh yang santun, yang mengayomi. Oleh karena itu, masyarakat umumnya selalu berharap agar Indonesia tetap damai, masyarakatnya menyandang predikat “masyarakat madani”, masyarakat yang menghargai perbedaan.

Dengan demikian, dapat ditarik pemahaman bahwa generasi tua semestinya memberi teladan yang baik bagi generasi muda, bukan sebaliknya, mempertontonkan perilaku yang “tidak elok” di depan umum. Terhadap orang-orang yang menyebar ujaran kebencian, kebohongan, dan sejenisnya pada akhirnya menuai “hujatan” pula dari kelompok masyarakat tertentu (silakan lihat *YouTube!*). Itulah dampak penggunaan bahasa yang mengandung hasutan, terutama dampak negatifnya bagi pengembangan kepribadian bangsa.

### **3. Kesantunan Bahasa**

#### **a. Kesantunan dalam Bahasa Indonesia**

Dalam bahasa Indonesia, kesantunan berbahasa tidak serumit pola dalam bahasa daerah. Namun, dalam hal kosakatanya, bahasa Indonesia tetap membedakan mana kata yang pantas dan mana yang tidak pantas ditujukan kepada seseorang. Sebagai contoh, kata *bapak* merupakan kata yang santun jika ditujukan kepada seorang laki-laki yang sudah berusia tua atau yang dihormati.

Kesantunan bahasa itu tidak saja ditandai oleh pilihan kata yang digunakan oleh penutur, seperti telah dikemukakan di atas, tetapi juga ditentukan oleh keseluruhan tuturan. Suatu tuturan yang tidak santun dapat dinilai dari pemahaman masyarakat penutur bahasa Indonesia yang bercermin pula pada bahasa daerahnya. Ucapan seorang tokoh partai dan juga berlatar belakang santri tidak pantas melontarkan tuturan seperti di bawah ini (*Kompas TV*, 19 April, 2018 pukul 09 Wita).

(15) *Prabowo bisa menang kalau saya jadi cawapresnya.*

(16) *Joko Widodo bisa kalah kalau saya tidak jadi cawapresnya.*

Kedua tuturan di atas bukan ujaran kebencian, tetapi tetap tidak santun karena dapat menyinggung perasaan seseorang atau kelompok lain. Sebuah “pernyataan” yang melibatkan tokoh tertentu serta mengandung “motivasi” tertentu, untuk menakut-nakuti, sehingga tuturan (15) dan (16) tersebut perlu dijadikan pertimbangan oleh pihak yang berkepentingan.

#### **b. Kesantunan dalam Bahasa Daerah Gengsi Bahasa Daerah**

Alokasi yang berbeda-beda antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan sendirinya mendudukan bahasa Indonesia pada kedudukan yang lebih tinggi daripada bahasa daerah. Bahasa Indonesia dipakai sebagai lambang identitas bangsa secara keseluruhan, suatu kedudukan yang tidak mungkin disandang oleh bahasa daerah. Bahasa Indonesia boleh dikatakan menikmati perlakuan khusus dalam banyak situasi, khususnya dalam situasi resmi kenegaraan. Ia dipakai di



bidang administrasi, pemerintahan, pendidikan, kemiliteran, perdagangan, keagamaan, dan penerangan.

Akan tetapi, dalam pandangan penutur bahasa daerah, kedudukan bahasa daerah mereka tidak dengan sendirinya lebih rendah daripada bahasa Indonesia. Sekurang-kurangnya bahasa daerah adalah sarana penyimpan khazanah adat dan budaya daerah yang tidak dapat digantikan oleh bahasa Indonesia. Atas dasar inilah bahasa daerah memiliki “gengsi”. Gengsi ini kemudian dapat menjadi perekat di tingkat daerah dan diharapkan pula menopang persatuan bangsa/nasional.

### **Mengapa Bahasa Jawa dan Bali?**

Etika berbahasa dalam bahasa daerah berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya di Indonesia. Bahasa Jawa dan Bali memiliki kesamaan sejarah masa lampau, selain sudah dikenal luas sehingga dapat dijadikan model tentang etika berbahasa masyarakat pada umumnya. Jejak sejarah mengenai kesamaan etika berbahasa kedua bahasa itu dapat ditelusuri dari tinggalan ekspedisi laskar Kerajaan Majapahit.

Di bawah pimpinan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit berhasil menaklukkan Bali pada tahun 1258 Saka (1336 M). Menurut Zoetmulder (1985), laskar Majapahit yang membanggakan diri sebagai bangsawan Jawa tidak ingin kembali ke Majapahit (Jawa), tetapi lebih memilih menetap di Bali. Laskar Majapahit yang sudah berbahasa Jawa-Pertengahan, sebagaimana yang digunakan dalam *Kitab Pararaton*, telah memengaruhi bahasa Bali dengan tingkatan-tingkatan bahasanya. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahasa dan kebudayaan Jawa dan Bali kemudian telah dijadikan bahan kajian oleh para ahli atau pemerhati bidang bahasa dan kebudayaan.

### **c. Kosakata Bahasa Jawa dan Bahasa Bali dengan Imbangannya dalam Bahasa Indonesia**

Pada bagian ini disajikan kosakata bahasa Jawa dan Bali dalam kalimat serta imbangannya dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan sajian ketiga bahasa tersebut dapat dilihat rumitnya kesantunan bahasa daerah Jawa dan Bali jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia.

Bahasa Jawa	Bahasa Indonesia
<i>Ngoko</i>	<i>Kromo</i>
(17) Bapak <i>wis</i> yuswa.	Bapak <i>sampun</i> yuswa. ‘Bapak sudah tua.’
(18) Sigit <i>nyaosake</i> permen-e marang Bapak.	Sigit <i>nyaosaken</i> permen-ipun dhateng Bapak. ‘Sigit memberi permen itu kepada Bapak.’
(19) Roti kui <i>di-pundhut</i> Bapak.	Roti punika <i>dipun-pundhut</i> Bapak. ‘Roti itu sudah Dibawa oleh Bapak.’
(20) Anggit nyuwun <i>dhuwit</i> Bapak.	Anggit nyuwun <i>arta</i> Bapak. ‘Anggit menanyai Bapak sejumlah uang.’
(21) Bapak sowan <i>marang</i> Pak Guru.	Bapak sowan <i>dhateng</i> Pak Guru. ‘Bapak mengunjungi Pak Guru.’

(Dikutip dari Poedjosoedarmo, 1986, hlm. 67--71)



Bahasa Bali		Bahasa Indonesia
<i>Lumrah</i>	<i>Alus</i>	
(22) <i>Tiang ningeh orta panak Meme.</i>	Tiang <i>miragi orti</i> pianak Meme.	‘Saya mendengar berita anak Ibu.’
(23) <i>Ia mara teka di desa.</i>	<i>Ipun wawu rauh ring</i> desa.	‘Ia baru datang di desa.’
(24) <i>Kurenane suba mulih.</i>	<i>Rabin-ida sampun mantuk.</i>	‘Istrinya sudah pulang.’
(25) <i>Ia maang nyamane uma atuluk.</i>	<i>Ipun nguwehin semeton-ida carik atuluk.</i>	‘Ia memberi Saudaranya sebidang sawah.’
(26) <i>Maketelun ia ditu.</i>	<i>Maketigang raina ipun irika.</i>	‘Selama tiga hari ia di sana.’

(Dikutip dari Kersten, 1984, hlm. 24-26)

#### d. Istilah Menyapa dan Menyebut

Selain kosakata umum yang menandai kesantunan berbahasa, istilah menyapa dan menyebut juga merupakan dua hal yang penting dalam bertutur sapa. Dalam sebuah komunikasi, apalagi yang sifatnya tatap-muka, kata-kata sapaan atau sebutan juga penting diperhatikan oleh komunikan. Uraian di bawah ini menyajikan perbandingan antara bahasa Indonesia yang digunakan dalam debat dan bahasa daerah Jawa dan Bali yang dijadikan model kesantunan berbahasa.

##### 1) Istilah menyapa

Istilah menyapa digunakan untuk menyapa orang kedua atau orang yang diajak berbicara. Sapaan yang digunakan sesuai dengan usia dan kedudukan seseorang dalam masyarakat.

##### Sapaan dalam Bahasa Indonesia

Istilah sapaan dalam bahasa Indonesia, seperti *engkau* dan *kamu* biasa digunakan untuk menyapa di antara anak-anak muda yang seusia. Dalam debat masih terlihat penggunaan sapaan *kau*, kependekan dari *engkau*, oleh pelibat untuk menyapa pelibat lainnya, seperti contoh di bawah ini.

(27) Kuingatkan *kau* ya bagaimana ....

Sapaan *kau* dalam konteks umum seperti dalam debat tersebut kurang tepat karena pelibat berusia tua. Berbeda halnya dengan pertunjukan sinetron yang pemainnya berusia muda, sapaan *kau* masih pantas digunakan. Sesungguhnya, ada sapaan yang lain, yakni *saudara* atau *bapak*, yang dapat digunakan untuk menyapa lawan bicara, seperti contoh berikut.

(28) Siapa yang *Saudara* maksudkan?

(29) Siapa yang *Bapak* maksudkan?

Belakangan dikenal sapaan *Anda* yang setara fungsinya dengan *Saudara*. Namun, penggunaan sapaan ini tetap harus mempertimbangkan siapa orang yang diajak berbicara. Bandingkan dengan kalimat berikut.

(30) Siapa yang *Anda* maksudkan?

(31) \*Siapa yang *Anda* maksudkan? (misalnya, untuk Presiden)

(Tanda asterik \* berarti ‘dilarang’ ditujukan kepada seorang presiden. Hal ini berbeda dengan “you” dalam bahasa Inggris).



### Sapaan dalam Bahasa Jawa

Dalam bahasa Jawa dikenal dan digunakan sapaan *Bapak*, baik *ngoko* maupun *kromo*, seperti contoh di bawah ini.

(32) *Bapak* tindak pundi? (*Ngoko*)

(33) *Bapak* arep nyang ndi? (*Kromo*)

‘Bapak akan pergi ke mana?’

Dalam bahasa Jawa, selama kata *bapak* tidak memiliki imbangan *kromo*, sapaan *bapak* dapat digunakan dalam situasi resmi, seperti contoh (34). Akan tetapi, dalam bahasa Jawa sendiri dikenal bentuk *kromo*, *panjenengan/njenengan*, atau *sampeyan*, seperti contoh (35).

(34) *Bapak* Sri Sultan Hamengku Buwono X

‘Bapak Sri Sultan Hamengku Buwono X’

(35) *Njenengan* sampun dhahar?

‘Anda sudah makan?’

### Sapaan dalam Bahasa Bali

Dalam bahasa Bali dikenal sapaan seperti *ragane* atau *jerone* untuk menyapa lawan bicara. Sufiks *-ne* pada kedua kata itu bermakna ‘definit’ (tertentu). Perhatikan pemakaiannya di bawah ini.

(36) *Ragane* ane ngelah carik-e ento? (*Lumrah*)

(37) *Jerone* sane nuwenang carik-e nika? (*Alus*)

‘Andakah yang punya sawah itu?’

Dalam bahasa Bali penggunaan sapaan *bapak* dirasakan kurang tepat oleh penutur untuk mengganti kedua sapaan tersebut karena asal usul lawan bicara harus dipertimbangkan.

## 2) Istilah Menyebut

Istilah menyebut digunakan untuk menunjuk orang ketiga atau orang yang dibicarakan.

### Sebutan dalam Bahasa Indonesia

Istilah menyebut dalam bahasa Indonesia, yakni *dia*, biasanya digunakan untuk menunjuk orang ketiga yang seusia. Penggunaan *dia* untuk menyebut orang yang lebih tua atau yang dihormati tentulah tidak pantas dalam budaya Indonesia, misalnya, seorang presiden, pemimpin, sultan, kyai, haji/hajah, ustaz, atau pendeta/pastur. Untuk penyebutan jabatan, pemimpin, gelar-gelar status yang dimiliki seseorang digunakan kata *beliau*. Dalam debat yang berlangsung, Joko Widodo sebagai presiden, dikacaukan dengan Joko Widodo sebagai individu/tidak dengan jabatan presiden.

### Sebutan dalam Bahasa Jawa

Dalam bahasa Jawa dikenal istilah “menyebut”, yakni *bapak* (laki-laki) dan *ibu* (perempuan), yang ditujukan kepada orang yang lebih tinggi status sosialnya atau orang yang pantas dihormati, seperti priayi, pemimpin agama, atau guru. Berikut adalah contoh penggunaan sebutan itu.

(38) Mbak Heni sering telpon *Bapak*.

‘Kakak Heni sering menelepon Bapak.’

(39) Radha kapenak, sing nunggoni *Bapak* karo *Ibu*.

‘Agak enak, yang menunggui Bapak dan Ibu.’



### Sebutan dalam Bahasa Bali

Dalam bahasa Bali dikenal pula istilah “menyebut”, yakni *iya* (*Lumrah*), *ipun*, dan *ida* (*Alus*). Berikut adalah contoh penggunaan sebutan itu:

(40) *Iya* ngelah carik liu. (Lumrah)

(41) *Ipun* meduwe carik akeh. (Alus)

(42) *Ida* meduwe carik akeh. (Alus)

‘Ia memiliki banyak sawah.’

Etika bahasa daerah Jawa dan Bali tersebut dapat dijadikan contoh oleh pemakai bahasa Indonesia. Bagaimana penggunaannya bergantung pada konteksnya. Bentuk sapaan bahasa Indonesia memang tidak serumit dalam kedua bahasa daerah tersebut, tetapi perilaku berbahasa penuturnya dapat dijadikan model beretika dalam berbahasa Indonesia.

### PENUTUP

Debat publik yang berlangsung menjelang Pilpres 2019 sungguh menyita perhatian masyarakat. Motivasi politik dan golongan kental memengaruhi debat yang berujung pada polarisasi masyarakat akar rumput. Penggunaan bahasa yang bermakna menghasut bertujuan untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2019 karena pelibat berharap dengan cara seperti itu ia dapat memenangkan status/posisi yang lebih dari lawan.

Pembaca/penonton yang bertindak sebagai “komunitas interpretif” mampu memberi penilaian bahwa isi debat publik seperti itu dapat memecah belah persatuan bangsa. Dampak negatifnya bagi generasi muda sudah terlihat bahwa mahasiswa sebagai generasi penerus telah teracuni oleh perilaku berbahasa generasi tua mereka.

Strategi yang dapat dipakai mengubah perilaku berbahasa yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa itu tidak lain adalah individu secara keseluruhan harus becermin pada etika bahasa, seperti yang dipraktikkan oleh penutur bahasa Jawa dan Bali. Etika bahasa pada kedua bahasa itu sudah menjadi rujukan, diakui oleh umum, bagaimana penuturnya menghargai orang lain seperti menghargai diri sendiri. Meskipun bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang “demokratis”, penutur harus tetap menggunakan pilihan kata yang santun.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G. B. (2018, 18 April). Langkah maju Jokowi. *Kompas*, Harian Nasional.
- Duranti, A. (1997). *Linguistic Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foley, W.A. (1997). *Anthropological Linguistics: An introduction*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Foucault, M. (2016). *Arkeologi Pengetahuan*. (Inyiak Ridwan Musir, penerjemah dan Edi AH Iyubinu, editor). Yogyakarta: Pelangi. (Karya asli diterbitkan pada 1969).
- Foucault, M. (2017). *Wacana Kuasa/Pengetahuan* (Yudi Santoso, penerjemah dan Toni Setiawan, Sufianto dkk., penyunting). Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea. (Karya asli diterbitkan pada 1972--1977).
- Geertz, C. (1974). Linguistic etiquette. Dalam J. Fishman, ed., *Reading in the Sociology and Language*. Den Haag: Mouton (hlm. 167—180).





- Gonda, J. (1975). The Javanese vocabulary of courtesy”. Dalam E.J. Brill, ed., *J. Gonda Selected Studies*. Volume V. Leiden: E.J. Brill (hlm. 255—298).
- Halliday, M.A.K. dan Hasan, R. (1985). *Language, Context, and Text: Aspects of language in a social-semiotic perspective*. Victoria: Deakin University Press.
- Harris, M. (1991). *Cultural Anthropology*. Edisi Ketiga. New York: Harfer Collins Publisher.
- Kersten, J. (1984). *Bahasa Bali: Tata bahasa dan kamus lumrah*. Ende-Flores: Nusa Indah.
- Kuper, A. dan Kuper, J. (2008). *Ensiklopedi Ilmu-ilmu sosial*. Edisi II. (Haris Munandar, penerjemah). Jakarta: PT RajaGrafindo. (Karya asli diterbitkan pada 1996).
- Laksana, I Ketut Darma. (2009). *Tabu Bahasa: Salah satu cara memahami kebudayaan Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Lubis, A.Y. (2014). *Postmodernisme: Teori dan metode*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Poedjosoedarmo, G. R. (1986). *Role structure in Javanese*. Seri NUSA, Vol. 24. Jakarta: Badan Penyelenggara Seri NUSA Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Salzmann, Z. (1998). *Language, Culture, and Society: An ntroduction to linguistic anthropology*. Edisi Kedua. Colorado: Westview Press. de Saussure, F. (1988). *Pengantar Linguistik Umum*. (R.S. Hidayat, penerjemah). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (Karya asli diterbitkan pada 1916).
- Sim, S. dan van Loon, B. (2008). *Mengenl Teori Kritis*. (Tim Resist, penerjemah.). Yogyakarta: Resist Book. (Karya asli diterbitkan tanpa angka tahun).
- Steinhauer, H. (2003). “Perkembangan bahasa Indonesia dari aspek teori linguistik”. Makalah disajikan dalam *Kongres Bahasa Indonesia VIII*, Oktober, Jakarta, Pusat Bahasa.
- Tinggen, I. N. (1995). *Sor singgih Basa Bali*. Singaraja: CV Rhika Dewata.
- Wardhaugh, R. (2006). *An Introduction to Sociolinguistics*. Oxford: Basil Blakwell.
- Zoetmulder, P.J. (2006). *Kalangwan: Sastra Jawa Kuno selayang pandang*. (Dick Hartoko, penerjemah). Jakarta: Jambatan. (Karya asli diterbitkan pada 1976).



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sidang Panel Sesi 1 Ruang 4**

Pembicara : Prof. I Ketut Darma Laksana  
Judul makalah : “Bahasa Indonesia di Ruang Publik: Penggunaannya dalam Debat Publik Menjelang Pilpres 2019”  
Hari, tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 08.00—09.30  
Moderator : Dr. Felicia Utorodewo  
Pencatat : 1. Purwaningsih  
2. Ferdinandus Moses  
3. Kunkun Purwati

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Wacana ruang publik itu tidak selalu berbentuk baliho, spanduk, tetapi juga berupa wacana termasuk juga pada wacana Pilpres.
2. Penggunaannya dalam acara debat umum menjelang Pilpres 2019 telah meresahkan masyarakat. Wacana tersebut banyak yang sifatnya menghasut.
3. Wacana dalam bidang sosial politik pada masa lampau berbeda dengan wacana pada era Reformasi saat ini, khususnya menjelang Pilpres 2019. Meskipun wacana yang berlangsung juga dikendalikan oleh relasi kuasa, praktik kewacanaannya lebih tepat disebut debat publik. Namun, debat publik yang berlangsung semata-mata bertujuan untuk kepentingan politik/golongan dengan sasaran memenangkan Pilpres sehingga debat diwarnai oleh pertengkaran.
4. Debat publik menjelang Pilpres 2019 yang kental bermuatan politik itulah yang dipertontonkan oleh pelibat ke khalayak ramai dengan cara yang tidak terpuji. Penggunaan kata-kata, seperti *pengibulan*, *proasing*, *ganti presiden*, *partai Allah*, *partai setan*, dan sejenisnya jelas mengandung hasutan, fitnah, atau ujaran kebencian karena dilontarkan tanpa alasan yang masuk akal.
5. Contoh lain adalah ungkapan “ganti presiden”. Ada nada kebencian pada wacana tersebut. Ini biasa dilakukan oleh partai oposisi untuk mencapai simpatisan masyarakat luas.
6. Kesantunan bahasa itu tidak saja ditandai oleh pilihan kata yang digunakan oleh penutur, seperti telah dikemukakan di atas, tetapi juga ditentukan oleh keseluruhan tuturan. Suatu tuturan yang tidak santun dapat dinilai dari pemahaman masyarakat penutur bahasa Indonesia yang becermin pula pada bahasa daerahnya. Ucapan seorang tokoh partai dan juga berlatar belakang santri tidak pantas melontarkan tuturan seperti ini *Prabowo bisa menang kalau saya jadi cawapresnya* atau *Joko Widodo bisa kalah kalau saya tidak jadi cawapresnya*.
7. Kesantunan bahasa itu merupakan cerminan budaya Indonesia. Akan tetapi, sekarang itu sudah tidak lagi dihiraukan. Betapa pentingnya hakikat sebuah bahasa karena dari bahasalah tecermin kepribadian suatu bangsa.



## **Tanya Jawab**

### **Penanya 1**

Nama : Heri Kurniawan  
Instansi : (Ikatan Jurnalisme Indonesia) Pemerhati Papua

#### **Pertanyaan:**

Kita tahu bahwa wacana kebencian itu juga dilontarkan oleh tokoh-tokoh terkenal. Bagaimana Bapak menanggapi hal itu?

#### **Jawaban:**

Saya sependapat dengan Bapak. Harusnya para tokoh dapat memberi contoh yang baik. Akan tetapi, karena keinginan memenangkan Pilpres akhirnya para tokoh tidak memedulikan kesantunan berbahasa. Era ini adalah era kebablasan dan mestinya pemerintah peduli. Akan tetapi, melihat karakter pemerintahan Jokowi ini, demokrasi yang kebablasan ini terabaikan dan cenderung dibiarkan.

### **Penanya 2**

Nama : Debi Sianturi  
Instansi : Jakarta

#### **Pertanyaan:**

Bagaimana dengan istilah *kecebong* dan *kampret* yang akhir-akhir ini sering kita dengar dalam wacana Pilpres?

#### **Jawaban:**

Istilah *kecebong* dan *kampret* menunjukkan orang yang tidak punya otak. Ini juga cerminan dari wacana Pilpres di Indonesia saat ini. Ini sangat meresahkan.

### **Penanya 3**

Nama : David  
Instansi : Ambon

#### **Pertanyaan:**

Fenomena bahasa politik di ruang publik ini menunjukkan krisis kebahasaan yang dihadirkan oleh elite politik. Penggalan kembali bahasa politik dalam ideologi bangsa pada masa lalu yang mempersatukan bangsa Indonesia sebaiknya diwacanakan kembali dengan melihat pandangan para nasionalis pada masa lalu yang telah mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa Indonesia.

### **Penanya 4**

Nama : Eli Suryani  
Instansi : Universitas Padjadjaran

#### **Pertanyaan:**

Bahasa dalam ruang publik yang tertera pada baliho, spanduk, dan potret juga mengajak orang-orang untuk memilikinya. Bagaimana berkomunikasi politik dalam ruang tersebut dan bagaimana pula etikanya? Apakah itu juga bagian dari “mantra” yang dapat menghasut orang?



**Jawaban:**

Ada mahasiswa saya yang membahas bahasa di ruang publik. Nanti akan saya tanyakan ideologi apa di balik itu. Potret itu juga “mantra” dalam bentuk visual.

**Penanya 5**

Nama : Djajat Sudrajat

Instansi: Media Group

**Tanggapan:**

1. Kita tidak dapat mengontrol masyarakat dalam berbahasa sehingga memang dibutuhkan edukasi yang baik dalam berbahasa. Seperti yang saya lakukan pada wawancara dengan masyarakat, larangan untuk menanggapi dengan cara memaki pada saat saya melakukan siaran langsung untuk program Media Group.
2. Sayangnya elite politik justru tidak dapat memberikan contoh berbahasa yang santun. Memang media internet seperti lautan bebas yang tidak bertepi. Seperti seorang profesor dari LIPI dimaki-maki di media internet oleh seorang anak remaja.
3. Keresahan ini mungkin dapat kita kendalikan melalui regulasi. Keberanian pemerintah dalam mengambil tindakan, seperti pelarangan yang dilakukan di negara Cina. Awalnya Facebook itu dilarang. Mungkin harus ada polisi khusus yang menangani kasus digital.
4. Masyarakat Indonesia sangat ambivalen/paradoks. Orang Indonesia itu sangat nasionalis. Seperti gambaran sepak bola, bagaimana hal yang menyangkut urusan bola membuat masyarakat bersatu. Orang Indonesia di luar negeri pun pasti ingin pulang.
5. Adanya inferioritas yang mendarah daging dan Bung Karno membebaskan itu. Bagaimana mengedukasi para politisi dan ini memang sangat sulit. Syarat menjadi caleg lebih mudah ketimbang menjadi PNS. Persoalan ini memang persoalan bangsa-bangsa terjajah.
6. Pada masa bercerai-berai, salah satu penyelamat bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia
7. Para politisi harus diikutkan dalam Kongres Bahasa Indonesia sebagai pembelajaran kebahasaan sehingga mengerti problem kebahasaan kita.
8. Harus dengan regulasi yang tegas. Persoalannya adalah mau atau tidak.

**Penanya 6**

Nama : Abdul Gaffar Ruskan

Instansi : Badan Bahasa

**Tanggapan:**

Kesantunan berbahasa tidak hanya terjadi pada kalangan bawah, tetapi juga pada para intelektual. Mengangkat berita ada 182 kata yang diubah pada ayat Alquran. Hal ini menjadi sangat ramai dan menimbulkan polemik dan mengundang caci maki yang dilontarkan oleh para intelektual. Padahal, yang diubah bukan kata, melainkan penulisan kata. Mestinya kita klarifikasi (*tabayum*). Selain itu, media massa juga harus hati-hati membuat judul dengan bahasa yang tidak menimbulkan polemik. Ini menjadi contoh ketidaksantunan berbahasa. Ini adalah tugas kita



semua untuk memberikan pembelajaran kesantunan berbahasa untuk anak-anak generasi kita selanjutnya.

**Isu-Isu Penting:**

1. Fenomena bahasa politik di ruang publik ini menunjukkan krisis kebahasaan yang dihadirkan oleh elite politik. Debat publik menjelang Pilpres 2019 yang kental bermuatan politik itulah yang dipertontonkan oleh pelibat ke khalayak ramai dengan cara yang tidak terpuji: cenderung menghasut dan tidak segan menjatuhkan lawan politiknya dengan cacian dan makian. Debat Capres dalam Pilpres 2019 menunjukkan elite-elite politik yang tidak memiliki kesantunan berbahasa.
2. Media internet seperti hutan belantara yang tidak dapat kita kontrol. Mudah orang-orang berdebat dalam media internet tanpa melihat kesantunan berbahasa. Keresahan ini mungkin dapat kita kendalikan melalui regulasi dan keberanian pemerintah dalam mengambil tindakan, misalnya, pelarangan seperti yang dilakukan di negara Cina.
3. Elite politik perlu duduk bersama membahas hal ini. Menyadarkan mereka betapa pentingnya kesantunan berbahasa itu. Padahal, sesungguhnya kesantunan berbahasa itu merupakan cerminan budaya Indonesia.



## 7. Strategi Penegakan Peraturan Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

### STRATEGI PENEGAKAN PERATURAN PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

**Munira Hasjim**

Universitas Hasanuddin  
munirahasjim@unhas.ac.id

#### Abstrak

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik makin tergusur oleh maraknya penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah. Makalah ini bertujuan mengungkapkan wujud penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik serta strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya penegakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi korelasional dan bersifat analitik. Penelitian berlokasi di Kota Makassar dengan sasaran semua pelaku bisnis yang bergerak pada bidang properti, perdagangan, perhotelan, dan kuliner. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sikap bahasa para pelaku usaha/bisnis terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di Kota Makassar, ditemukan adanya indikasi bahwa penghargaan bangsa Indonesia terhadap bahasa nasionalnya makin berkurang. Bahasa Indonesia tidak lagi menjadi alat kebanggaan bangsa dan dianggap tidak dapat menjadi media untuk memajukan kegiatan bisnis oleh para pelaku usaha/bisnis. Ada lima strategi yang dapat dilakukan untuk menegakkan aturan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, yakni (1) penertiban terhadap penggunaan bahasa pada media massa/sosial yang masih menggunakan bahasa asing; (2) sosialisasi kebijakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia; (3) pembinaan dan pengembangan bahasa secara periodik; (4) pemberlakuan peraturan daerah tentang aturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah; dan (5) penjalinan relasi dan kerja sama dengan semua elemen masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan lambang identitas nasional.

**Kata-kata kunci:** strategi, pengutamaan, bahasa Indonesia, ruang publik

#### Abstract

*The use of Indonesia language in public space is increasingly shifted by the rise of foreign and region languages. The paper aims to reveal the form of Indonesia language use in the public space and strategies that can be conducted as an effort to prioritize the use of Indonesia language in the public space. The research uses correlational and analytical methods. It was conducted in Makassar in all business performer engaged in property, trade, hotel, and culinary. The research on the language behaviour of business performer to the use of Indonesia language in Makassar shows that the appreciation of Indonesian nation to the national language is decreasing. Indonesian language is no longer becomes a marker of national pride and cannot be a media for advancing business activities done by business performers. There are 5 (five) strategies that can be done to enforce the rules of prioritizing Indonesia language in the public space, namely 1) control the*



*use of foreign languages in mass medias or social medias; 2) socialize the language policy, i.e. to prioritize the use of Indonesia language; 3) cultivate and develop the language periodically; 4) applying regional regulations of using Indonesian language in public spaces and sanctions to be given by the government; 5) establish relationships and cooperation with all elements of society. Those strategies are expected to raise the dignity of the Indonesian language as a unifying language and symbol of national identity.*

**Keywords:** *strategy, priority, Indonesian language, public space*

## **PENDAHULUAN**

Momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 telah menghasilkan sebuah keputusan penting yang mendudukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia dalam perkembangannya telah mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, bahasa, dan etnik ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia.

Bahasa Indonesia makin kokoh kedudukannya ketika perjuangan politik bangsa Indonesia mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan telah mengukuhkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III Pasal 25 sebagaimana dikutip dari ([http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/UU\\_2009\\_24.pdf](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/UU_2009_24.pdf)) terdapat ketentuan sebagai berikut ini.

- 1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.
- 2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
- 3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Atas dasar undang-undang tersebut berkembanglah penjabarannya dalam segala sektor kehidupan nasional yang makin kompleks dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, administrasi negara, perundang-undangan, politik, perdagangan, pers, dan pergaulan antaretnik/antarsuku.

Bangsa Indonesia telah mencapai usia kemerdekaan yang ke-73 tahun. Hal itu menandakan bahwa perjalanan sejarah bangsa ini sudah terbilang tua dan dalam tahap yang sangat mapan. Namun, usia mapan tersebut tidak berarti bahwa bahasa Indonesia tidak mengalami berbagai masalah.

Permasalahan yang menyangkut kebahasaan di Indonesia sangatlah kompleks. Permasalahan itu tidak hanya menyangkut bahasa Indonesia, tetapi juga bertemali dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh keanekaragaman bahasa daerah dan penggunaan bahasa-bahasa asing tertentu, terutama bahasa



Inggris. Seiring sejalan dengan permasalahan bahasa tersebut, persoalan bahasa sebagai sarana ekspresi estetis turut menambah kompleks persoalan kebahasaan.

Situasi globalisasi pun menjadi salah satu permasalahan berat yang dihadapi bahasa Indonesia dalam eksistensinya sebagai sarana komunikasi formal dan informal. Era globalisasi seperti saat ini telah memberi peluang besar bagi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang penggunaannya sangat sulit dihindari. Pengaruh ini tampaknya menyentuh hampir semua aspek penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing (bahasa Inggris) makin menggejala terutama di ruang publik. Hal ini dapat ditemukan mulai dari nama institusi, perusahaan—seperti restoran, hotel, rumah sakit, mal, warung kopi, dan iklan-iklan yang terpasang di pinggir jalan, bahkan warung-warung yang banyak terdapat di tepi jalan. Fenomena ini terus berlanjut dan sepertinya pihak penguasa tidak mampu mengaturnya.

Penggunaan bahasa di ruang publik di Indonesia sangat fenomenal, menarik, dan bervariasi. Situasi kedwibahasaan dan kemultibahasaan menandai penggunaan bahasa pada ruang publik. Pada kenyataannya, bahasa daerah dan bahasa Inggris masih mendapat porsi utama. Artinya, rasa cinta terhadap bahasa Indonesia terkalahkan oleh bahasa daerah dan bahasa Inggris. Padahal, penggunaan bahasa di ruang publik sudah diatur oleh negara. Penggunaan bahasa pada ruang publik di seluruh wilayah Indonesia harus mengikuti aturan sebagaimana tertuang dalam undang-undang.

Fenomena tersebut di atas menarik diteliti untuk mengetahui bagaimana wujud penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik. Signifikansi hasil kajian mengenai ruang luar publik terletak pada pengungkapan fenomena ruang terbuka yang bersifat lokal dan partisipatif (Rahaju dan Nuryanto, 2009). Hal itu mirip seperti yang diungkapkan oleh Yeyen Maryani pada *Harian Republika* (2015) bahwa ruang publik merupakan cerminan dari identitas bangsa dan bahasa adalah identitas bangsa. Artinya, fenomena penggunaan bahasa di ruang publik perlu diungkap untuk menunjukkan sikap positif masyarakat terhadap bahasanya, terutama bahasa Indonesia. Sebagai bangsa yang berbudaya dan menjunjung persatuan bangsa, sikap positif terhadap bahasa Indonesia senantiasa harus dijaga (Lukman, 2015).

## LANDASAN TEORI

Merujuk pada beberapa peraturan, seperti (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah, (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang, dan (3) Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, disebutkan bahwa bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 bersumber dari bahasa Melayu. Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagaimana disebutkan di atas menjadi acuan penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan komunikasinya. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan untuk menghindari penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional,





transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Lukman (2015) menjelaskan acuan lainnya. Misalnya, dalam Seminar Politik Bahasa Nasional dengan tema “Mengawal Bangsa Besar dengan Bahasa” yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa pada tahun 2015 di Hotel Best Western, Jakarta, tersurat keinginan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa regional ASEAN dalam mengantisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada pengujung tahun 2015. Salah seorang pembicara kunci dalam seminar tersebut, yaitu Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia saat itu, mengingatkan bahwa untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi ASEAN secara politis rintangannya cukup berat. Secara historis bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan pendukung bahasa Melayu sepertinya lebih kuat dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, seandainya pendukung bahasa Indonesia dan bahasa Melayu bersatu menjadi Melayu-Indonesia, tidak mustahil hal itu bakal bisa terwujud. Akan tetapi, menurut Irman Gusman, jangan bercita-cita menjadi bahasa regional ASEAN sementara masalah-masalah internal dalam bangsa sendiri untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri sepertinya belum mampu. Irman Gusman sendiri menunjuk nama hotel yang menjadi tempat kegiatan seminar, yaitu *Best Western*, sebagai bukti bahwa memang institusi yang diberi kewenangan mengurus soal kebahasaan di Indonesia belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Itulah sebabnya, pertanyaan kunci yang muncul dari mantan Ketua DPD RI itu adalah “Di manakah engkau Badan Bahasa selama ini?”

Muslich (2010, hlm. 33) mengemukakan bahwa jati diri bahasa Indonesia dalam era globalisasi perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal itu diperlukan agar bahasa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Meskipun disadari bahwa bahasa Indonesia tidak mungkin menutup diri dari pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing, bahasa Indonesia harus diberi posisi dan peran sebagai bahasa utama dalam ranah publik atau umum sehingga bahasa Indonesia tetap bertahan diri di tengah-tengah pergaulan antarbangsa.

Garvin dan Mathiot (1972, hlm. 371--373) dalam Lukman (2012) mengemukakan bahwa terdapat tiga ciri sikap bahasa, yakni (1) kesetiaan bahasa, (2) kebanggaan bahasa, dan (3) kesadaran adanya norma bahasa. Kesetiaan bahasa merupakan sikap yang mendorong komunitas sebuah bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain yang bisa mengancam eksistensi bahasanya. Sementara itu, kebanggaan bahasa merupakan sikap yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan kelompok atau komunitas. Adapun kesadaran akan norma bahasa merupakan wujud sikap yang mendorong orang agar selalu menggunakan bahasanya secara cermat dan santun dan merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku berbahasa.

Ketiga ciri tersebut merupakan ciri sikap positif terhadap bahasa. Sebaliknya, jika ciri sikap positif itu sudah tidak ada atau sudah tidak dimiliki oleh penutur sebuah bahasa, penutur bahasa tersebut sudah bersikap negatif terhadap bahasanya. Dengan kata lain, apabila sebuah kelompok masyarakat sudah tidak memiliki gairah atau dorongan menggunakan bahasanya atau tidak lagi memiliki rasa bangga



terhadap bahasanya dan mengalihkan rasa bangga itu pada bahasa lain, mereka sudah bersikap negatif terhadap bahasanya.

Lukman (2012, hlm. 25) mengemukakan bahwa pada dasarnya setiap orang semestinya memiliki sikap positif terhadap bahasanya. Namun, sikap positif itu bisa berubah menjadi sikap negatif apabila seseorang atau sekelompok orang mendapat pengaruh dari luar, terutama dari kelompok yang memiliki prestise tertentu di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Mereka dapat memengaruhi penutur bahasa tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penutur sebuah bahasa bersikap negatif terhadap bahasanya. Yang lebih parah lagi kalau penutur bahasa tersebut mengetahui betul keunggulan bahasa kedua sebagai bahasa yang dominan dalam persaingan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Sejalan dengan itu, Kamaruddin (1992, hlm. 41) mengemukakan bahwa pada situasi seperti itu, orang bisa saja menyatakan pandangan positif terhadap bahasa kedua, di samping menyatakan sikap negatif secara relatif terhadap bahasa pertamanya.

Pilihan-pilihan bentuk kebahasaan yang digunakan seseorang biasanya mencerminkan sikap bahasanya. Oleh Rahardi (2009), sikap bahasa disebutkan sebagai pilihan-pilihan bentuk kebahasaan yang digunakan seseorang setelah melewati pertimbangan-pertimbangan yang kompleks. Oleh karena itu, kebanyakan sikap dan perilaku berbahasa seseorang cenderung dipandu oleh keinginan-keinginan memperoleh prestise. Hal seperti itulah yang sering membuat orang suka memilih menggunakan kata-kata atau istilah asing karena aspek kebanggaan berbahasa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode observasi korelasional dan bersifat analitik. Selain mengkaji keterkaitan antarvariabel, penelitian ini ingin melihat pengaruh sikap bahasa terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara. Di samping itu, dilakukan observasi situasi penggunaan bahasa di tempat atau wilayah sasaran tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Adapun populasi penelitian ini adalah semua pelaku bisnis di Kota Makassar yang bergerak pada bidang properti, perdagangan, perhotelan, dan kuliner. Karena besarnya populasi tidak diketahui secara pasti, sampel dibatasi sejumlah 120 orang dengan sistem sampel blok, yaitu menetapkan sebanyak 30 responden terhadap empat kelompok usaha bisnis yang dipilih sebagai sumber data. Postur sampel seperti itu dipandang representatif mewakili populasi. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan desain dan tujuan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah di ruang publik masih dominan. Hal itu menjadi indikasi bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 belum memberikan dampak terhadap upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri. Di mana-mana masih terlihat tumbuh subur penggunaan bahasa asing dalam berbagai situasi dan ranah pemakaian bahasa, termasuk media-media luar ruang, tempat-tempat umum, nama-nama tempat usaha, dan nama-nama produk seperti yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, benarlah apa yang

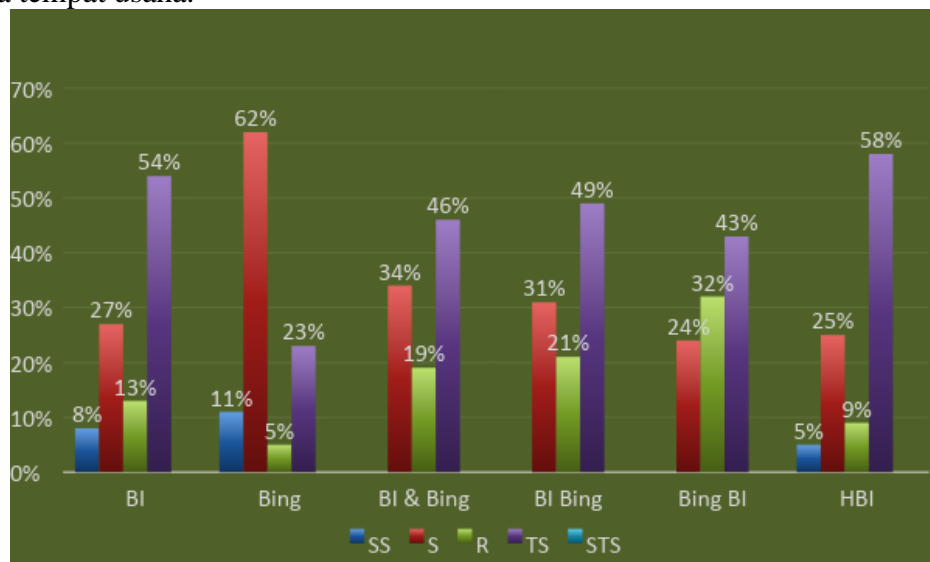
dikemukakan oleh Moeliono sebagaimana termuat di *Kompas* tahun 2010 yang menyatakan bahwa penguasa/pemerintah Indonesia kelihatannya kurang berdaya mengatur rambu-rambu pemakaian bahasa di tempat umum dan terbuka yang berakibat bahasa asing (Inggris) sudah mengisi ranah kehidupan yang semula diisi dengan bahasa Indonesia (Lukman, 2003: 35).

Untuk menjawab permasalahan dalam makalah ini, berikut ini dibahas bagian per bagian dari masalah sebagaimana hasil analisis data dalam penelitian yang telah dilakukan.

## 1. Wujud Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

### a. Penggunaan Campur Kode Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di kalangan pengguna bahasa di ruang publik, secara umum diperoleh gambaran adanya campur kode bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Dengan demikian, tergambarlah sikap dan pandangan mereka terhadap penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing pada nama tempat usaha dan nama produk. Pada sektor perhotelan, misalnya, mereka menyebutkan bahwa mereka cenderung memilih menggunakan bahasa asing karena sasaran atau objek pasar yang dibidik adalah orang dari luar (luar negeri atau orang asing). Oleh karena itu, mereka merasa sangat tepat apabila menggunakan bahasa Inggris sebagai nama tempat, nama hotel, atau nama ruang dalam hotel. Di samping itu, mereka menganggap bahasa Inggris lebih bergengsi dan elegan. Dengan alasan itu, hasil analisis data kuesioner juga menunjukkan bahwa sikap mereka terhadap penggunaan bahasa Indonesia rata-rata hanya pada skala sikap yang kurang positif. Grafik 1 menunjukkan sikap bahasa responden terhadap penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing terkait nama-nama tempat usaha.



**Grafik 1**

**Persentase Wujud Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing sebagai Nama Tempat Usaha dan Nama Produk**

Berdasarkan Grafik 1 di atas, tampak bahwa dalam hal penggunaan bahasa Indonesia sebagai nama tempat usaha dan nama produk, 54% menyatakan tidak setuju dan hanya 26,66% yang menyatakan setuju. Sementara itu, untuk bahasa Inggris ternyata yang menyatakan setuju sebesar 62,22% dan hanya 23,33% yang

menyatakan tidak setuju. Selanjutnya, dengan pernyataan yang menyangkut penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara bersama-sama (bahasa Indonesia ditempatkan di atas dan bahasa Inggris di bawah), responden juga menunjukkan ketidaksetujuan, yaitu dengan persentase sebesar 48,88%. Akhirnya, dengan pernyataan hanya bahasa Indonesia yang digunakan sebagai nama tempat usaha atau nama produk, ternyata pada umumnya mereka juga tidak setuju (57,77%) dan hanya 25,55% yang menyatakan setuju. Hal ini makin jelas mengindikasikan bahwa sikap bahasa mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi negara negatif.

Data tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki ikatan emosional dengan bahasa nasionalnya sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas, dan sebagai simbol jati diri bangsa. Kebanggaan memilih bahasa Inggris sebagai nama tempat usaha dan nama produk mengalahkan kebanggaan terhadap bahasa nasionalnya. Untuk menguatkan argumen yang telah dituangkan dalam grafik di atas, di bawah ini disertakan gambar penggunaan campur kode bahasa asing yang mendominasi nama usaha dan nama produk, khususnya di wilayah Makassar.

Berikut ini nama-nama tempat di Makassar yang dinamai dengan bahasa asing. Misalnya, tempat wisata diberi nama *Bugis Water Park*; perumahan dinamai *Green House Hasanuddin*; kafe dengan nama *One Café*; dan mal bernama *Makassar Town Square* atau disingkat MTos.



## b. Wujud Interferensi Penggunaan Kata Asing (Inggris) di Ruang Publik

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang berprestise, bahasa tinggi, bahasa yang keren. Mereka menggunakan bahasa Inggris dengan pemahaman secara parsial. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat kita tidak mengenal dan tidak mengetahui bagaimana bahasa Inggris itu dituliskan dan digunakan secara benar. Mereka hanya memahami bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang dapat menaikkan prestise dan gengsi usaha yang mereka kerjakan.



Kedua contoh gambar di atas makin menguatkan bahwa bahasa Inggris sebagai nama produk usaha atau pun tempat usaha lebih dipilih oleh responden. Mereka, antara lain, mengemukakan alasan bahwa bahasa Inggris lebih bergengsi, lebih berprestise, dan lebih elegan. Meskipun demikian, mereka kerap salah dalam menuliskan bahasa Inggrisnya ketika memperkenalkan produk atau nama usaha mereka.

### c. Wujud Campur Kode Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah di Ruang Publik

Sebagian masyarakat Indonesia dalam menyampaikan pesan komunikasinya melakukan pendekatan lokatif atau penerapan leksikon atau kata-kata yang bernuansa lokal atau *glokalisasi* sebagai sandingan dari kata *globalisasi*. Pemberdayaan ungkapan yang bermuatan lokal dalam kegiatan bertutur dipandang oleh sebagian masyarakat memiliki daya persuasi yang tinggi. Gambar di bawah ini adalah sebagian contohnya.



Gambar 1 dan Gambar 2 di atas membuktikan bahwa penggunaan leksikon yang bermuatan lokal menjadi pilihan karena dianggap dapat membangun relasi keakraban dan memberikan komitmen yang dapat dipercayai oleh masyarakat. Bahasa daerah dipergunakan di ruang publik dengan asumsi bahwa bahasa daerah memiliki nilai emotif dan persuasif yang dapat menarik simpati masyarakat.

Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah di ruang terbuka umum atau ruang publik memiliki daya komunikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, produktivitas penggunaan bahasa asing dianggap lebih mendominasi sehingga peluang dan nilai prestise bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan bahasa nasional menjadi lemah. Akibatnya, masyarakat memberikan respons negatif terhadap status dan kedudukan bahasa Indonesia.



## 2. Strategi Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Terbuka Umum (Ruang Publik)

Garvin dan Mathiot telah menjelaskan bahwa ada tiga sikap bahasa yang dimiliki oleh pengguna bahasa, yaitu loyalitas bahasa, kebanggaan bahasa, dan ketaatan pada norma bahasa. Apabila pendukung sebuah bahasa sudah tidak loyal terhadap bahasanya, tidak berusaha membela bahasanya dari pengaruh luar, dan sudah enggan menggunakan bahasanya, pendukung bahasa itu dikatakan sudah bersikap negatif terhadap bahasanya.

Situasi kebahasaan yang kompleks seperti telah dikemukakan di atas memerlukan suatu strategi kebijakan yang dapat mengatur dengan cermat, tepat, dan arif bijaksana penggunaan ketiga kelompok bahasa itu (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing). Oleh karena itu, perencanaan bahasa Indonesia adalah upaya yang tidak mungkin dihindari. Setidaknya, pesatnya perkembangan bahasa dan sastra Indonesia dan gencarnya “serangan” globalisasi harus diimbangi dengan mengencarkan glokalisasi. Dalam hal ini, bahasa Indonesia harus memiliki kedudukan yang stabil dan tepercaya. Kebijakan politik diasumsikan dapat mengembangkan dua hal, yaitu pengembangan bahasa dan penciptaan situasi-situasi sosial. Di pihak lain, kebijakan bahasa secara resmi di kalangan pemerintahan dan pendidikan merupakan upaya menyatukan rasa nasionalisme.

Dalam makalah ini ditawarkan lima strategi pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia, khususnya di ruang publik, seperti berikut ini.

1. Perlu dilakukan penertiban terhadap media (spanduk, baliho, *banner*, papan nama) instansi/institusi/perusahaan yang masih menggunakan bahasa asing tanpa menyandingkannya dengan bahasa Indonesia. Penertiban ini bertujuan agar wibawa pemerintah selaku pembina dan pengembang bahasa Indonesia terlihat oleh masyarakat. Dengan demikian, biro iklan atau pun pembuat jasa layanan masyarakat berhati-hati dalam menuangkan ide atau pun konsep yang akan disampaikan kepada khalayak umum.
2. Perlu upaya sosialisasi kebijakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia. Sosialisasi ini dapat dilakukan secara periodik pada media massa, seperti televisi, koran, majalah, serta media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Line. Melalui media massa dan media sosial, diperkenalkan sejumlah kosakata bahasa Indonesia yang konsepnya jelas dan lebih komunikatif jika dibandingkan dengan menggunakan bahasa Inggris. Sosialisasi yang dilakukan harus melibatkan banyak pihak dari berbagai elemen masyarakat.
3. Pembinaan bahasa perlu dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahasa Indonesia dan penggunaannya serta sosialisasi UU RI No. 24 Tahun 2009 karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.
4. Tiap daerah perlu membuat peraturan daerah. Tiap daerah yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara perlu membuat kebijakan yang sama tentang aturan penggunaan bahasa di ruang publik dan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus membuat peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat, khususnya di ruang publik. Selain itu, pemerintah harus melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang



melanggarnya agar menjadi jera, seperti yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang menurunkan spanduk yang menggunakan bahasa asing. Pemerintah daerah perlu lebih berperan aktif dalam menertibkan penggunaan bahasa asing dan mengutamakan penggunaan bahasa negara sesuai dengan amanat undang-undang.

5. Perlu dijalin relasi dan kerja sama dengan semua elemen masyarakat, instansi, institusi pendidikan, perusahaan, dan asosiasi periklanan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 33) disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Sementara itu, bahasa-bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Adapun bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Dengan memberikan pemahaman tentang pasal tersebut, upaya pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik diharapkan dapat berjalan dengan baik karena masyarakat telah mengetahui dan memahaminya. Jalinan kerja sama berupa pelibatan semua elemen masyarakat akan mengangkat harkat dan martabat bahasa Indonesia dan mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, terhormat, dan cinta terhadap bahasanya, bahasa Indonesia. Jayalah Indonesia, jayalah bahasa Indonesia.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa wujud penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sangat rendah. Hal itu terbukti dengan banyaknya pencampuran kode bahasa Inggris dan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia di ruang publik. Masyarakat menganggap bahwa bahasa asing adalah jaminan mutu, berprestise, dan bergengsi. Sebaliknya, bahasa Indonesia makin terpinggirkan dan bahkan sudah hampir ditinggalkan akibat rendahnya kesadaran masyarakat yang lebih bangga menggunakan bahasa asing. Masyarakat lebih suka berbahasa asing karena menilai bahasa asing lebih relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Tanpa mereka sadari, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar UU RI No. 24 Tahun 2009, khususnya Pasal 26 sampai dengan Pasal 40 yang secara jelas membahas kewajiban penggunaan bahasa Indonesia.

Strategi pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang dapat dilakukan sebagai upaya mengembalikan wibawa dan harga diri bahasa sebagai lambang identitas nasional adalah dengan melakukan penertiban penggunaan bahasa asing di ruang publik; secara rutin melakukan sosialisasi; melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sehingga terkesan bahwa bahasa Indonesia dapat mengikuti perkembangan zaman; pemberlakuan peraturan daerah secara tegas dan merata di seluruh pelosok tanah air mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik; dan yang terakhir membangun relasi dan kerja sama serta pelibatan semua komponen dalam menjaga dan memelihara bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, sebagai lambang identitas nasional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa>. Diakses 25 Februari 2018.
- Birnie.M. F. (1988). *Language Attitudes and Language Preferences: A Study of Bavarian Business; Attitude Toward American and British English*. www.docstoc.com.
- Chaer, Abdul. (2007). *Leksikologi dan Leksikografi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Garvin, P.L. dan Matthiot M. (1982). “*The Urbanization of the Guarani Language, Problem in Language and Culture*” dalam Fishman (ed) *Reading in The Sociology of Language*. Paris: Moton The Hauge.
- Wikipedia Bahasa Indonesia. (2012). “Globalisasi”, Ensiklopedi Bebas. <http://id.wikipedia.org/wiki/globalisasi>. Diakses tanggal 5 November 2017.
- Kompas. (2017). Prioritaskan Pemakaian Bahasa Indonesia di Ruang Publik. <https://kompas.id/baca/utama/2017/09/20/prioritaskan-pemakaian-bahasa-indonesia-di-ruang-publik/>. Diakses pada 20 September 2017.
- Lukman. (2012). “Hegemoni Bahasa Asing terhadap Bahasa Indonesia”. Makalah disampaikan pada Kongres Internasional di Hankuk University, Korea Selatan.
- (2012). “Vitalitas Bahasa: Pergeseran dan Pemertahanan Bahasa”. De La Macca: Makassar.
- (2015). “Local Languages Shift in South Sulawesi: Case Four Local Languages (Bugis, Makassar, Toraja, Enrekang)”. *Journal of Language and Literature*, ISSN:2078-0303, Vol. 6 No. 3 Iss. 1, August, 2015.
- Moelyono, Anton M., (1987). *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di Dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Jambatan.
- Muchlis, Masnur dan I Gusti Ngurah Oka. (2010). *Perencanaan Bahasa pada Era Globalisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.(2007). *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing*. Dendy Soegono (Penyunting). Ed. 2. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Rahardi, R. Kunjana. (2009). *Bahasa Prevoir Budaya*. Jakarta: Pinus Book Publisher.
- Suhardi, Basuki. (1996). *Sikap Bahasa*. Depok: Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.





**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 3 Kelompok 3**

Pembicara : Dr. Munira Hasjim, S.S., M.Hum.  
Judul makalah : “Strategi Penegakan Peraturan Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2019  
Pukul : 08.00—09.30  
Moderator : Dr. Maryanto  
Pencatat : Anita Astriawati Ningrum

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik semakin tergesur oleh maraknya penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah.
2. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan wujud penggunaan bahasa Indonesia dan strategi penegakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.
3. Ada beberapa faktor yang memaksa mereka menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah, yaitu ekonomi, politik, dan budaya.
4. Tantangan dalam penegakan aturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik berupa (1) arus globalisasi yang tidak dapat dihindari, (2) pertimbangan sosial ekonomi, penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah membuat produk mereka tidak kalah bersaing dengan produk dari luar negeri, prestise, mengambil kepercayaan dari konsumen, sosial (bahasa asing lebih berfungsi secara sosial bagi generasi muda), dan (3) kedisiplinan.
5. Makalah ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah.
6. Masalah dan tantangan yang dihadapi: (1) arus globalisasi yang memberi peluang besar terhadap bahasa asing dan (2) keanekaragaman bahasa daerah sebagai alat pengungkap ide dan gagasan.
7. Garvin dan Mathiot (1972) mengemukakan bahwa terdapat tiga ciri sikap bahasa seseorang, yakni (1) kesetiaan bahasa yang mendorong seseorang mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain, (2) kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat, dan (3) kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun dan merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Ketiga ciri itu merupakan ciri sikap positif, dan sebaliknya apabila pendukung sebuah bahasa sudah tidak loyal terhadap bahasanya, tidak berusaha membela bahasanya dari pengaruh luar, dan sudah enggan menggunakan bahasanya, pendukung bahasa itu dikatakan sudah bersikap negatif terhadap bahasanya.
8. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah di ruang publik masih dominan. Hal ini menjadi indikasi bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 belum memberikan dampak terhadap upaya menjadikan bahasa Indonesia tuan di negeri sendiri.



9. Wujud penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik: campur kode dengan bahasa Inggris, wujud interferensi penggunaan kata asing di ruang publik, dan campur kode bahasa Indonesia dengan bahasa daerah.
10. Makalah ini menawarkan lima strategi yang dapat digunakan untuk pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia khususnya di ruang publik, yaitu:
  - (1) Perlu dilakukan penertiban terhadap media yang masih menggunakan bahasa asing tanpa menyandingkannya dengan bahasa Indonesia.
  - (2) Upaya sosialisasi kebijakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia. Sosialisasi ini dapat dilakukan secara periodik pada media massa, seperti televisi, koran, majalah, serta media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, dan media lainnya. Melalui media massa dan media sosial, diperkenalkan sejumlah kosakata yang memberikan konsep yang lebih jelas dan komunikatif jika dibandingkan dengan menggunakan bahasa Inggris. Sosialisasi yang dilakukan harus melibatkan banyak pihak dan berbagai elemen masyarakat sebagai sasarannya.
  - (3) Pembinaan bahasa perlu dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahasa Indonesia dan penggunaannya serta sosialisasi UU RI No. 24 Tahun 2009 karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.
  - (4) Tiap daerah perlu membuat kebijakan yang sama tentang aturan penggunaan bahasa di ruang publik dan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah.
  - (5) Menjalin relasi dan kerja sama dengan semua elemen masyarakat, instansi, institusi pendidikan, perusahaan, dan asosiasi periklanan.
11. Masyarakat bukan tidak mau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, tetapi masyarakat memiliki pengetahuan yang minim tentang aturan berbahasa dan kata-kata baku dalam bahasa Indonesia.
12. Batasan pengutamaan bahasa Indonesia: fokus pada bahasa tulis di spanduk, baliho, dan poster. Boleh menggunakan bahasa asing dan bahasa daerah, tetapi yang utama bahasa Indonesia. Ukuran huruf juga harus diperhatikan.
13. Yang ditakuti oleh masyarakat adalah sanksi, bukan peraturan.

## **Tanya Jawab**

### **Penanya 1**

Nama : Mahmudah  
Instansi : Universitas Negeri Makassar

### **Pertanyaan:**

1. Sikap masyarakat positif, tetapi kesadaran terhadap norma bahasa rendah.
2. Mengapa memilih responden pelaku bisnis?

### **Jawaban:**

1. Konteks bahasa Melayu tidak bisa digunakan di Indonesia karena kaidah-kaidahnya berbeda sesuai dengan budaya masing-masing.
2. Bahasa Indonesia terpengaruh oleh tidak stabilnya negara karena semasa Orde Baru kekuatan negara memengaruhi penggunaan bahasa Indonesia pada saat itu.



3. Pelaku bisnis di Makassar merasa penggunaan bahasa asing memiliki prestise dan lebih cepat memperoleh keuntungan

**Penanya 2**

Nama : Gunadi  
Instansi : Asosiasi Pengusaha Media Luar Griya

**Pertanyaan:**

1. Pengutamaan berarti tidak ada sanksi? Bedakah sanksi terhadap penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing?
2. Kalangan atas selalu cocoknya dengan bahasa Inggris. Seberapa jauh UU masih berlaku? Akan disempurnakan atau bagaimana?

**Jawaban:**

Hal-hal dalam mengawal UU tersebut menjadi efektif untuk dipatuhi:

1. perlu menjalin kerja sama yang intens dengan pihak terkait;
2. perlu ketegasan dari pemerintah daerah;
3. banyak masyarakat yang tidak paham kaidah ejaan; dan
4. periklanan: jika ada pemesan harus disampaikan mengenai peraturan yang berlaku.

**Penanya 3**

Nama : Abdul Ghafar Ruskan  
Instansi : pemerhati bahasa

**Tanggapan:**

Ruang publik menggambarkan masyarakatnya. Berbagai sanksi sudah disiapkan ketika membuat UU Nomor 24 Tahun 2009, tetapi belum disetujui DPR. Perangkatnya juga sudah sisipkan.

Penggunaan bahasa asing pada penamaan sebetulnya hanya gagah-gagahan saja karena terbukti tidak ada hubungannya dengan konsumen.

Pemda harusnya peduli dengan membuat peraturan daerah sebagai turunan dari UU.

**Penanya 4:**

Nama : Zulfidar  
Instansi : Asosiasi Periklanan Indonesia

**Pertanyaan:**

Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dianggap mendekati dan pilihan jatuh pada bahasa Inggris atau bahasa daerah.

**Usulan:**

Deklarasi menggunakan bahasa Indonesia adalah mutlak dalam penggunaan bahasa Indonesia di luar ruang.



**Penanya 5:**

Nama : Asiati  
Instansi : SMP Negeri 231, Jakarta

**Pertanyaan:**

1. Bagaimana sebaiknya mengenalkan pengutamaan bahasa Indonesia di sekolah?
2. Apakah ada kontribusi dari kampus untuk mengenalkan pengutamaan bahasa Indonesia?

**Jawaban:**

Pengabdian masyarakat dari kampus ke sekolah-sekolah hanya mengajarkan tata bahasa, bukan aturan penggunaan bahasa Indonesia. Penyuluhan bahasa Indonesia termasuk dalam Tridarma Bakti Perguruan Tinggi.

**Isu-Isu Penting:**

Lima strategi yang dapat digunakan untuk pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia khususnya di ruang publik, seperti di bawah ini.

1. Perlu dilakukan penertiban terhadap media (spanduk, baliho, *banner*, papan nama instansi/institusi/perusahaan) yang masih menggunakan bahasa asing tanpa menyandingkannya dengan bahasa Indonesia. Penertiban ini bertujuan agar wibawa bahasa pemerintah selaku dewan pembina dan pengembang bahasa Indonesia terlihat oleh masyarakat. Dengan demikian, biro iklan, atau pembuat jasa layanan masyarakat, berhati-hati dalam menuangkan ide atau konsep yang akan disampaikan kepada khalayak umum.
2. Upaya sosialisasi kebijakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia. Sosialisasi ini dapat dilakukan secara periodik di media massa, seperti televisi, koran, majalah, serta media sosial, seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, dan media lainnya. Melalui media massa dan media sosial diperkenalkan sejumlah kosakata yang memberikan konsep yang lebih jelas dan komunikatif jika dibandingkan dengan menggunakan bahasa Inggris. Sosialisasi yang dilakukan harus melibatkan banyak pihak dan berbagai elemen masyarakat sebagai sasarannya.
3. Pembinaan bahasa perlu dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahasa Indonesia dan penggunaannya serta sosialisasi UU RI No. 24 Tahun 2009 karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.
4. Tiap daerah yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara ini perlu membuat kebijakan yang sama tentang aturan penggunaan bahasa di ruang publik dan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus membuat peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat, khususnya, di ruang publik serta melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggarnya agar memiliki efek jera seperti yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yakni dengan menurunkan spanduk yang menggunakan bahasa asing. Pemerintah daerah harus lebih berperan



- aktif dalam menertibkan penggunaan bahasa asing dan mengutamakan penggunaan bahasa negara Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang.
5. Menjalinkan relasi dan kerja sama dengan semua elemen masyarakat, instansi, institusi pendidikan, perusahaan, dan asosiasi periklanan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 33) disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Sementara itu, bahasa daerah yang tersebar di seluruh desa di Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Maka dari itu, dengan memberikan pemahaman sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 33 tersebut, upaya pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dapat berjalan dengan baik karena masyarakat telah mengetahuinya melalui jalinan kerja sama berupa pelibatan semua elemen dalam mengangkat harkat dan martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memiliki peran, tugas, fungsi yang mengantar bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat, terhormat, dan cinta terhadap bahasanya, bahasa Indonesia.



## 8. Peran Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing dalam Strategi Pemasaran Kue Artis di Kota Bandung

### PERAN BAHASA INDONESIA, DAERAH, DAN ASING DALAM STRATEGI PEMASARAN KUE ARTIS DI KOTA BANDUNG

*The Role of Indonesian, Local, and Foreign Language in the Marketing Strategy of Artists Cake in Bandung City*

Tri Indri Hardini<sup>a</sup>, Temmy Widyastuti<sup>b</sup>, Yatun Romdonah Awaliah<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

tihardini@upi.edu

#### Abstrak

Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi yang paling penting dalam berbagai jenis pemasaran (bisnis). Bahasa yang digunakan dalam berbisnis haruslah bahasa yang baik dan menarik perhatian konsumen karena iklan yang baik dan pemasaran yang baik akan membantu keberhasilan suatu produk. Berdasarkan hasil pengamatan, penggunaan bahasa tersebut dianggap tidak terlalu penting. Atas dasar target pasar, bahasa untuk memasarkan suatu produk pun dinilai tidak beraturan. Ketidakteraturan tersebut terlihat dari campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah (Sunda) serta antara bahasa Indonesia dan bahasa asing (Inggris). Selain itu, dari struktur bahasanya pun tidak sedikit yang tidak gramatikal. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkap dan mendeskripsikan situasi bahasa Indonesia, bahasa daerah (Sunda) dan bahasa asing (Inggris) dalam pemasaran kue artis di Kota Bandung, khususnya dalam media sosial. Atas dasar keinginan masyarakat Indonesia menginternasionalisasikan bahasa Indonesia dengan menjunjung nilai bahasa daerah, kasus seperti ini harus ditemukan solusinya. Berdasarkan hasil observasi, di kota-kota besar di Indonesia penggunaan bahasa asing lebih banyak ditemukan di tempat umum dibandingkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket, dan dilakukan observasi, wawancara, juga studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia masih mendominasi pemasaran produk dibandingkan dengan bahasa daerah dan bahasa asing, tetapi bahasa yang digunakan itu bukan bahasa Indonesia yang baik, bukan bahasa Sunda yang tepat, dan bukan bahasa asing yang benar.

**Kata-kata kunci:** bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing, pemasaran, kue artis

#### Abstract

*Language is used as the most crucial communication tool in different types of marketing (business). The language used in business should be a good language and attract the attention of consumers because good advertising and good marketing will help the success of a product. Based on the observation, the use of the language was considered not too important. On the basis of the target market, the language to market a product was considered irregular. The irregularities were seen from the mixed code between the Indonesian language and the local language (Sundanese) as well as between Indonesian language and a foreign language*



*(English). In addition, from the structure of the language, it was found that it tended to be not grammatical. This article was written based on research conducted with the purpose of exposing and describing the situation of Indonesian, local languages (Sundanese), and foreign languages (English) in the marketing of artists' cake in Bandung, especially in social media. On the basis of the desire of the Indonesian people to internationalize the Indonesian language by upholding the value of regional languages such cases should be found a solution. From the observation results, in big cities in Indonesia the use of foreign languages was more commonly found in public places compared to Indonesian or local languages. The methods in this study used descriptive method; the data was collected by using questionnaires, observations, interviews, and literature study. The results of this study indicated that the use of Indonesian language still dominates the marketing of products compared to local and foreign languages, but the language used was not a good Indonesian, not an appropriate Sundanese, and not a proper foreign language.*

**Keywords:** Indonesian, local language, foreign language, marketing, artists cake

## **PENDAHULUAN**

Pada acara diskusi koordinasi peningkatan dan pemeliharaan bahasa di ruang publik dan kalangan aparatur di Jawa Barat tahun 2015, Ivan Lanin memberikan tanggapannya mengenai usaha dan sosialisasi bahasa Indonesia untuk badan usaha di Kota Bandung karena banyak sekali nama tempat dan toko-toko yang menggunakan bahasa asing (Inggris). Sangat disayangkan bahasa nasional dan bahasa daerah (Sunda) dianggap kurang menjual dalam dunia bisnis/usaha di Kota Bandung. Sunendar dalam Kompas (20/12/2017) mengungkapkan bahwa kedaulatan bahasa Indonesia itu harus terus diperjuangkan, salah satunya dengan mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Jawa Barat, Khak (2011) menyatakan bahwa dari 171 papan reklame di Jalan Dago Bandung, ternyata hampir 70% menggunakan bahasa asing (news.okezone.com).

Daya tarik bahasa sangat penting dalam suatu usaha. Keputusan, perencanaan, pengawasan, dan manajemen usaha bergantung pada bahasa yang digunakan. Pemasaran suatu produk memerlukan bahasa yang menjual dan menarik perhatian konsumen. Dalam hal ini bahasa berperan penting dalam kegiatan mempromosikan suatu produk.

Saat ini media massa, baik media cetak maupun media elektronik, termasuk media sosial, berperan penting dalam memasarkan suatu produk. Bahkan, jenis media sosial, seperti Instagram merupakan media sosial yang banyak digunakan untuk berjualan. Dalam dunia usaha, seorang konsumen akan memilih pemilik usaha yang sudah dikenal masyarakat, misalnya, selebritas; dan banyak sekali selebritas atau artis yang memilih peruntungan dalam berbisnis. Jenis usaha yang mereka pilih pun beragam mulai dari pakaian hingga makanan. Bisnis kue yang sekarang sedang marak di kalangan artis menjadi fenomena tersendiri dalam dunia bisnis Indonesia. Di setiap daerah di Indonesia, sejumlah toko kue artis ramai dikunjungi konsumen. Usaha ini bahkan menggeser produk lokal yang sudah melegenda. Walaupun sifatnya sementara, bentuk usaha kue ini sempat menjadi bahan diskusi warganet di berbagai media, baik yang pro maupun kontra. Pokok diskusi itu meliputi rasa, bahan, nama produk, pengakuan khas daerah tempat



usaha, bahkan bahasa yang digunakan dalam iklan di media sosial. Karena mudah menarik para konsumen, bahasa iklan yang digunakan seharusnya baik. Jika tidak, penggunaan bahasa yang salah berpotensi untuk diikuti oleh para konsumennya. Awalnya bahasa yang digunakan para artis tersebut menyebutkan bahwa kuenya adalah khas dari daerah setempat, padahal nyatanya bukan oleh-oleh yang khas, melainkan oleh-oleh terobosan baru. Hal ini diakui setelah artis tersebut dihujani komentar dan masukan dalam berbagai media (Ilham, 2017). Hal ini diketahui pula dari beberapa penelitian yang mengungkapkan hal tersebut (Nurjanah dan Widyastuti, 2017), yaitu penggunaan iklan menggunakan istilah “oleh-oleh kekinian”. Namun, dengan model pemasaran yang sama, rasa yang tidak begitu berbeda, pada akhirnya oleh-oleh kekinian kue artis tersebut diprediksi tidak akan lama bertahan (Suara.com, 2017). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa berpengaruh kuat terhadap pemasaran suatu produk.

Perubahan redaksi “oleh-oleh khas daerah” menjadi “oleh-oleh kekinian” ternyata berdampak untuk pelaku usaha. Dilihat dari iklan yang diunggah dalam media sosial, bahasa yang digunakan pun kurang begitu baik, di antaranya, campur kode; sikap bahasa pengusaha; kesalahan penerapan imbuhan; bahasa yang dipaksakan; dan yang paling fenomenal adalah hal tersebut terjadi dalam bahasa Indonesia dan daerah saja, sementara bahasa asing (Inggris) digunakan secara konsisten dalam penamaan merek dan juga produk. Kesalahan berbahasa dalam iklan tersebut memaksa para konsumen untuk memahaminya. Sebagai contoh, ketika suatu produk kue menggunakan campur kode, mungkin saja konsumen yang tidak berasal dari daerah Jawa Barat akan mengira bahwa seperti itulah bahasa Sunda, padahal secara struktur hal tersebut salah.

Menarik massa merupakan taktik yang digunakan pengusaha untuk menjual produknya. Seorang pengelola pemasaran satu produk kue artis di Bandung yang diwawancarai menyebutkan bahwa penggunaan campur kode tersebut ditujukan untuk pasar remaja agar bahasa yang digunakan lebih menarik dan tidak terkesan kaku. Sementara itu, penggunaan bahasa asing yang konsisten dalam penamaan produk dipandang lebih keren. Kondisi ini terlihat sangat miris karena hal tersebut berkembang dan bahkan diikuti oleh produk baru lainnya, walaupun tidak semua produk melakukan hal yang sama. Menurut Sholikah dkk. (2018), ditinjau dari ilmu bahasa, kesalahan berbahasa akan menyebabkan kerancuan struktur bahasa dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, harapannya adalah dengan menggunakan bahasa yang baik penjualan produk yang dipasarkan pun menjadi baik dan konsumen pun bisa belajar dari ketertarikan bahasa yang dipromosikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kondisi bahasa dalam pemasaran kue artis di Kota Bandung. Semakin banyak artis yang memiliki usaha bisnis kue di Kota Bandung, semakin berkembang pula sumber penelitian ini. Bahasa seperti apa yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen? Apakah bahasa Indonesia, bahasa daerah (Sunda), atau bahasa asing (Inggris)? Dari ketiga bahasa tersebut, posisi mana yang digunakan pengusaha agar produknya banyak terjual di pasaran? Dari bahasa yang digunakan, mengapa campur kode dijadikan pijakan untuk mempromosikan produk kue? Apabila tujuannya hanya untuk melihat target pasar, hal tersebut bisa berakibat fatal.

Penelitian ini penting dilaksanakan untuk mengetahui sikap bahasa masyarakat Indonesia dalam kasus berbisnis di lingkup yang lebih kecil. Dengan demikian, konsep internasionalisasi bahasa Indonesia yang didukung bahasa daerah yang kini





digalakkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan banyak didiskusikan di berbagai media massa dapat menjadi lanjutan dari penelitian ini. Apalagi pemerintah telah memberi dukungan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 72 Tahun 2015, yaitu kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai label yang datang dari luar (bisnis.tempo.co). Dengan mengambil sampel satu daerah saja yang nanti akan dilanjutkan dengan membandingkannya dengan bisnis-bisnis kue di daerah lainnya, diharapkan penelitian ini menjadi dasar pijakan untuk survei kebahasaan dalam mempromosikan suatu produk. Cinta produk dalam negeri akan lebih melekat dengan menggunakan bahasa sendiri.

## LANDASAN TEORI

### 1. Campur Kode

Secara teori, penelitian ini berkaitan erat dengan campur kode. Fasold dalam Chaer (2004) menyatakan bahwa dalam campur kode itu terjadi *hybrid clauses*, *hybrid phrases* berupa klausa dan frasa yang digunakan secara bercampur. Hal ini terlihat dari analisis postingan promosi di Instagram dengan mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, bahkan termasuk bahasa Inggris di dalamnya. Sebenarnya penggunaan campur kode itu memiliki tujuan mengakrabkan diri dengan seseorang yang diajak bicara, dalam hal ini adalah konsumen. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Septia (2017) bahwa menjalin keakraban adalah salah satu penyebab terjadinya campur kode, tetapi apabila digunakan secara terus-menerus dikhawatirkan hal ini akan menyebabkan kesalahpahaman makna maupun kecacauan struktur bahasa itu sendiri.

Untuk masyarakat bilingual, permasalahan campur kode memang tidak bisa dihindarkan. Menurut Backus (2005), salah satu faktor yang dapat mendorong campur kode dan alih kode adalah bilingualisme. Perubahan tersebut bisa terjadi melalui beberapa pola: 1) replikasi normal (penggunaan kata dengan pola yang dikenal; 2) stabilitas (tidak ada perubahan); 3) inovasi (menggunakan pola baru yang berbeda dengan pola yang lama; dan 4) propagasi (lebih memilih pola yang baru daripada pola lama).

Seorang penutur bilingual memiliki kemampuan menguasai dua bahasa yang sama baiknya. Dengan demikian, apabila terjadi percampuran antara keduanya memang tidak bisa disalahkan. Namun, konteksnya saja yang harus mulai diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman karena citra suatu bahasa bergantung pada penuturnya. Menurut Kim (2006), dari kemampuan bilingual, banyak aspek sosial dan aspek budaya yang dapat terlihat sampai terjadi campur kode. Grumperz dalam Kim (2006) mencatat bahwa ketika dwibahasawan disadarkan tentang campur kode mereka, yang disalahkan adalah ketidakpahaman atas kemampuan berbahasa yang kurang cakap. Proses campur kode, di antaranya, adalah 1) penyisipan; 2) pergantian, yaitu proses pergantian yang sangat sering terjadi di komunitas bilingual dan relatif stabil, tetapi hal ini akan sangat mengganggu struktur bahasa; dan 3) pergeseran, leksikalisasi kongruen (Muysken dalam Kim, 2006).

### 2. Sikap Bahasa

Selain campur kode, penelitian ini bertalian pula dengan sikap bahasa. Garvin dan Mathiot dalam Chaer (2004) menyatakan bahwa sikap bahasa itu mencakup

kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran akan adanya norma, termasuk bagaimana sikap seorang pembisnis terhadap bahasa yang digunakan dalam promosi produknya. Melander dkk. (2003) menyatakan bahwa perkembangan sikap bahasa, terutama dalam masyarakat bilingual, dapat terlihat dari kesetiiaannya dalam menggunakan satu bahasa dan bagaimana prestise bahasa yang digunakan, seperti yang dicetuskan Garvin dan Mathiot dalam Lencek (1990). Dalam penelitian ini terlihat bahasa Indonesia masih dominan, tetapi penggunaannya harus terus diperbaiki dari kesalahan struktur.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Secara sederhana metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dimaksudkan untuk mencari dan mendatangi langsung toko kue artis tersebut dan dilanjutkan dengan wawancara terhadap penanggung jawab yang mengunggah iklan di media Instagram. Penelitian ini mengambil tujuh objek bisnis kue artis yang akan diteliti: Bandung Makuta, Bandung Kanaya, Princess Cake, Bandung Kunafe, Madinah Cake, Cieta Cake, dan Pevo Cake.

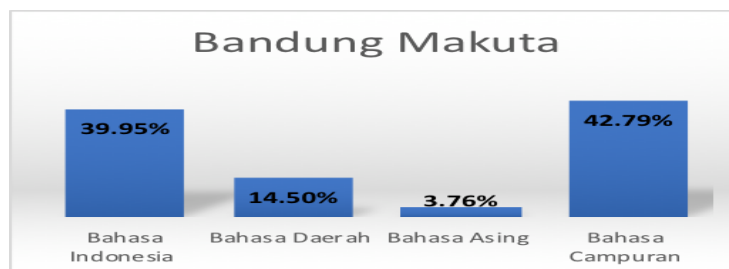
## PEMBAHASAN

Bisnis kue yang saat ini sedang digeluti oleh banyak artis memberikan fenomena perkembangan bisnis tanah air. Bisnis ini perlahan-lahan menggeser oleh-oleh lokal yang merupakan warisan nenek moyang karena kue “kekinian” ini disukai banyak konsumennya. Penelitian ini mengambil tujuh objek bisnis kue artis yang akan diteliti: Bandung Makuta, Bandung Kanaya, Princess Cake, Bandung Kunafe, Madinah Cake, Cieta Cake, dan Pevo Cake. Tiap-tiap toko kue ini dimiliki oleh artis walaupun dari beberapa informasi yang diperoleh, artis ini hanya digunakan sebagai duta jenama (*brand ambassador*) dari usaha kue kekinian.

Di ketujuh bisnis kue artis ini, sang artis ikut aktif berdagang di berbagai media. Salah satu yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemasaran produk di Instagram. Bahasa menjadi poin penting yang dianalisis, yaitu bagaimana bahasa dipandang sebagai bagian dari usaha yang dijual, bahasa seperti apa yang digunakan, dan bagaimana sikap para pebisnis toko kue tersebut terhadap bahasa yang digunakan dalam pemasaran produknya.

### a. Bandung Makuta

Sampai dengan tanggal 26 Februari 2018, Instagram Bandung Makuta telah mengunggah sebanyak 3.434 foto. Penjelasan penggunaan bahasa dapat dilihat pada grafik berikut ini.



**Grafik 1**  
**Bandung Makuta**

Penggunaan bahasa dalam promosi kue artis Bandung Makuta di instagram didominasi oleh bahasa campuran sebanyak 42,79%; promosi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang utuh hanya 39,95%; bahasa Sunda hanya digunakan sebanyak 14,50%; dan bahasa asing 3,76%. Campur kode banyak terjadi dalam unggahan promosi Bandung Makuta dengan tujuan untuk menjalin keakraban dengan konsumen.

Berikut adalah campur kode dalam unggahan promosi akun @bandungmakuta: *“Makuta coklat memang memikat! Kelezatan **cake coklat** asli dan **cream cheese** coklat jadi perpaduan yang bikin ga bisa **move on** asli ngangeniiin **pisan!**”*

Dari unggahan di atas terlihat adanya penyisipan bahasa Inggris dan bahasa Sunda dalam struktur bahasa Indonesia. Unggahan tersebut tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dengan sistem penulisan ejaan yang salah. Hal ini memungkinkan orang yang tidak tahu bahasa Indonesia akan mengikuti kesalahan tersebut. Bentuk campur kode tersebut adalah *hybrid code mixing* (percampuran tiga bahasa dalam satu kalimat). Hampir semua produk (penamaan kue) Makuta menggunakan bahasa Inggris. Hanya satu produk yang menggunakan bahasa Sunda, yaitu produk *Makuta Peuyeum*, tetapi tetap dalam deskripsi unggahan tersebut kata *peuyeum* diganti dengan *cassava* (bahasa Inggris). Menurut tuturan pemegang akun resmi Bandung Makuta, penggunaan bahasa campuran dalam pemasaran produknya ditujukan untuk para konsumen remaja karena memang target penjualan produk kue tersebut adalah remaja hingga dewasa. Agar tidak terlalu kaku, sisi bahasa pemasaran pun dibuat tidak formal, yaitu dengan banyaknya campur kode pada setiap frasa, klausa, dan kalimatnya.

Istilah dalam sistem pemasaran pada Bandung Makuta terbagi ke dalam dua bagian, yaitu *hard selling* yang berkenaan dengan inti produk yang dipasarkan, yaitu kue; dan *soft selling* bagian luar yang mendukung pemasaran produk inti, seperti promosi produk lainnya, permainan, olahraga, motivasi, dan informasi-informasi penting, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.



Tutorial: pencet telapak tangan bagian bawah lalu benjolan itu akan muncul di balik pergelangan tangan hahaha, Pas Ceu Min SD dulu, katanya benjolan itu menentukan jumlah anak di kemudian hari. Padahal *mah* hubungannya apa coba ya? Urang Sunda, *cung* siapa yang dulunya percayaaa *sok* ngaku haaa

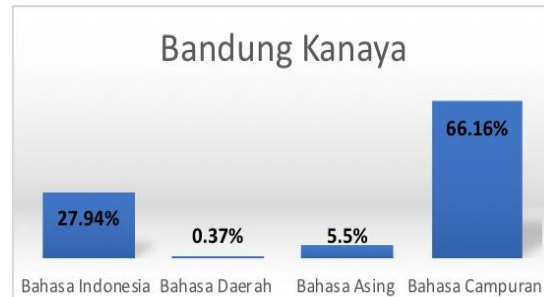
**Gambar 1 Makuta**

Bentuk campur kode dalam kalimat di atas adalah campur kode ke dalam (*inner code mixing*). Unggahan pada Gambar 1 berisi informasi seputar kebiasaan lama masyarakat Jawa Barat untuk mengetahui jumlah anak dengan cara menekan telapak tangan bawah lalu menghitung jumlah benjolan di tangan tersebut. Walaupun hal ini sebenarnya hanya mitos, sampai saat ini hal tersebut biasa dilakukan di kalangan anak-anak. Unggahan tersebut tidak ada hubungannya

dengan produk kue yang dipromosikan. Menurut pemegang akun resmi, apabila yang diunggah dalam akun penjualan hanya berisi *hard selling* semua, dikhawatirkan para netizen merasa jenuh. Dengan adanya informasi lain yang disebut *soft selling* seperti itu, netizen akan terpuaskan dengan berbagai informasi yang didapatkan.

#### b. Bandung Kanaya

Sampai dengan tanggal 26 Februari 2018, Instagram Bandung Kanaya sudah mengunggah sebanyak 272 foto dengan perincian penggunaan bahasa sebagai berikut.



**Grafik 2**  
**Bandung Kanaya**

Sama halnya dengan Bandung Makuta, Bandung Kanaya pun banyak menggunakan bahasa campuran dalam promosi produknya, yaitu sebanyak 66,16%, mengalahkan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa asing. Penggunaan bahasa Indonesia sebanyak 27,94%, bahasa Inggris sebanyak 5,5%, dan bahasa Sunda sebanyak 0,37%. Bahasa campuran, yaitu bahasa Indonesia, Sunda, dan asing digunakan untuk menjalin keakraban. Berbeda dengan Bandung Makuta yang lebih menargetkan remaja sebagai konsumennya, Bandung Kanaya menargetkan semua umur sebagai konsumennya karena dari hasil pengamatan bagian pemasaran, usia konsumen Bandung Kanaya adalah remaja sampai orang tua. Bahasa campuran yang digunakan oleh Bandung Kanaya adalah bahasa Indonesia-Sunda-Inggris, penyisipan terjadi antarfrasa, klausa, dan kalimat, seperti yang tertulis di bawah ini.



bandungkanaya • Follow

bandungkanaya Wilujeng wengi sadayana, apa coba favourite kue wargi sadayana?? Se jauh ini Matcha Choco jadi jawara di #BandungKanaya wargi sadayana resép numana? kedap deui aya variant rasa baru looh tos siap nyobian rasa baru?? 😊😊

=====

Bandung Kanaya sedia dalam 5 Variant rasa

- \* Original Choco
- \* Dark Orange
- \* Matcha Choco
- \* White Choco
- \* Milky Peanut

Wilujeng wengi sadayana, Apa coba *favourite* kue wargi sadayana?? Se jauh ini *Matcha Choco* jadi jawara di #BandungKanaya wargi Sadayana resép numana? Kedap deui aya *variant* rasa *baru looh* tos siap nyobian *rasa baru*?

## Gambar 2 Bandung Kanaya

Dalam unggahan Bandung Kanaya di atas, terlihat penyisipan bahasa Inggris dalam kontruksi bahasa Sunda. Unggahan di atas merupakan unggahan bahasa Sunda dengan menggunakan unsur campur kode yang dimasukkan ke dalamnya. Campur kode yang digunakan dalam satu kalimat adalah campur kode campuran (*hybrid code mixing*) bahasa Sunda, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Produk dalam Bandung Kanaya pun semuanya menggunakan bahasa Inggris. Alasan pemegang akun resmi ketika ditanyakan alasan penamaan produk menggunakan bahasa Inggris, jawabannya adalah tidak semua rasa ada padanan bahasa Indonesianya. Padahal, semua produk dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini terbukti bahwa penamaan produk dengan menggunakan bahasa Inggris menjadi lebih bergengsi daripada bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah, walaupun mereka tidak menyadari secara langsung.



bandungkanaya • Follow

bandungkanaya Halloo wargi Bandung, nih diingetin lagi yaa, sekarang #bandungkanaya buka 24jam, jadi gausah ketakutan kehabisan, jalan jalan di Bandung pun makin nyantai, abis jalan jalan pulang malem cape juga ada mamang gojek yang bisa antar pesenan kue favorit sadayana, di borong yuuu sadayana 😊😊

pratamachypra24 Masih nggak bisa sih udah buka go food tulisannya toko sudah tutup @bandungkanaya

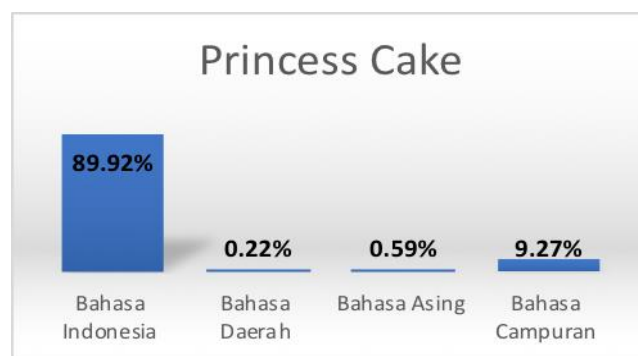
Haloo wargi Bandung, nih diingetin lagi yaa, sekarang #bandungkanaya buka 24jam, jadi gausah ketakutan kehabisan. Jalan-jalan di Bandung pun makin nyantai, abis jalan-jalan pulang malem cape juga ada mamang gojek yang bisa antar pesenan kue favorit sadayana, diborong yuu sadayana.

## Gambar 3 Bandung Kanaya 2

Dari unggahan di atas campur kode yang terjadi adalah campur kode ke dalam (*inner code mixing*) antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, yaitu sisipan kata bahasa Sunda masuk dalam konstruksi bahasa Indonesia. Kalimat di atas tidak masuk dalam konstruksi bahasa Indonesia atau bahasa Sunda dan ejaannya yang kurang tepat. Hal ini membuktikan bahwa sang pemegang akun resmi tidaklah cermat dalam menggunakan bahasa. Sama halnya dengan Bandung Makuta, semua kue artis memiliki istilah pemasaran *hard selling* dan *soft selling* yang tujuannya sama, yaitu agar setiap konten yang diunggah bisa menarik para warganet, agar tidak bosan dengan unggahan produk langsung. Menurut sang pemegang akun resmi Bandung Kanaya, artis pemilik usaha ini ikut merangkai dan memeriksa setiap unggahan dalam akun Instagram dan munculnya penyisipan bahasa Sunda ditujukan sebagai identitas kue tersebut yang berlokasi di Jawa Barat (Bandung).

### c. Bandung Princess Cake

Data sampai dengan 26 Februari 2018, Bandung *Princess cake* mengunggah foto promosinya sebanyak 2.194 buah, dengan pengikut sejumlah 105.000 orang dalam akun Instagramnya.



Grafik 3  
Princess Cake

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa yang dominan dipakai dalam penjualan kue *princess* ini adalah bahasa Indonesia dengan hasil persentase 89,92%, bahasa Inggris 0,59%, bahasa Sunda 0,22%, dan campuran bahasa Indonesia, Inggris, dan Sunda 9,27%. Penamaan produk kue-kue di *Princess Cake* rata-rata menggunakan bahasa Inggris dan sedikit menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakannya tidak baku. Penggunaan bahasa Indonesia gaul diyakini akan mudah dipahami oleh anak-anak zaman sekarang.



Jangan sampe kehabisan *Cake Of The Month* di @bandungprincesscake Varian *Greentea Choco* ini hanya ada di Bulan maret!! Yakin gamau coba?? Cuss langsung aja yuukk!!

Gambar 4  
Bandung Princess Cake 1



Bentuk campur kode dalam unggahan di atas adalah campur kode ke luar (*outer code mixing*) yaitu menyisipkan klausa berbahasa Inggris ke dalam konstruksi bahasa Indonesia. Tujuan penggunaan campur kode dalam *Princess Cake* bertalian dengan suasana santai, agar tidak terlalu formal. Bahasa yang digunakannya pun dibuat tidak formal dengan cara menggunakan kosakata yang menunjukkan sifat manja sang pemilik usaha. Hal ini dilakukan agar setiap warganet yang membaca deskripsi gambar dari setiap unggahan pasti mengikuti gaya berbicara sang pemilik usaha yang memiliki gaya berbicara yang sangat khas. Menurut para konsumen, hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Bahasa pemasaran kue tersebut dibuat sama, baik antara bahasa langsung dan bahasa pemasaran dengan kebiasaan sang pemilik usaha. Menurut pengamatan tim pemasaran, kue ini ditargetkan untuk semua usia. Rata-rata konsumennya adalah orang dewasa (pekerja kantor). Dari hasil analisis penggunaan bahasa, iklan kue ini tidak terlalu banyak campur kode. Bahasa Indonesia yang mendominasi keseluruhan *hard selling* dan *soft selling* menunjukkan bahwa target dari usaha ini adalah segenap masyarakat Indonesia.



bandungprincesscake • Follow

bandungprincesscake Hayooo keun  
suamina bewokan ..  
Incess loverss naon deui nyaa papatah kolot  
baheula ??  
Yuk isi di kolom komentar dan TAG 3 teman  
termanjaahh kamu yaa ..

Hayooo *keun* *suamina*  
*bewokan*...incess lovers *naon deui nyaa*  
*papatah kolot baheula??* Yuk isi di  
kolom komentar dan TAG 3 teman  
termanjaahh kamu yaa...

### Gambar 5 Bandung *Princess Cake* 2

Selain unggahan penjualan produk, akun Instagram Bandung *Princess Cake* banyak mengunggah promosi berupa informasi budaya, kompetisi, promosi diskon produk, hadiah, ucapan, pengumuman, kuis, permainan, sepak bola, saran, dan iklan beberapa produk lain. Bahasa yang digunakan dalam pemasaran pun masih didominasi oleh bahasa Indonesia. Adapun sedikit bentuk campur kode dalam unggahan di atas adalah campur kode ke dalam (*inner code mixing*).

#### d. Bandung Kunafé

Data sampai dengan 26/2/2018 terdapat 1.102 unggahan dengan jumlah pengikut sebanyak 94.000 di akun Instagram.



**Grafik 4**  
**Bandung Kunafe**

Bahasa yang dominan dipakai dalam pemasaran kue *Bandung Kunafe* ini adalah bahasa Indonesia dengan hasil persentase 86,02% dan pemakaian bahasa Sunda sekitar 1,90%. Sementara itu, pemakaian bahasa Inggris hanya 0,02% dan itu pun digunakan dalam penamaan produk saja. Intensitas pemakaian bahasa campuran mencapai 12,06%.

Selain mengunggah promosi penjualan produk, akun Instagram *Bandung Kunafe* mengunggah pula promosi produk melalui layanan promosi yang berupa kompetisi, promosi, hadiah, ucapan, pengumuman, kuis, permainan, rekomendasi tempat wisata, khususnya yang ada di daerah Jawa Barat, dan promosi melalui pertandingan sepak bola. Berikut adalah beberapa unggahan promosi akun Bandung Kunafe.



Kunafens, nggak kerasa ya, sebentar lagi udah mau masuk bulan Ramadhan. Alhamdulillah, momen apa yang kamu rindukan? *Saur on the road*, buka bareng, atau apa nih?

**Gambar 6**

#### **Bandung Kunafe**

Bentuk campur kode pada unggahan di atas adalah campur kode ke luar (*outer code mixing*) dengan penyisipan kata dalam bahasa Inggris yang dicampurkan dalam konstruksi bahasa Indonesia. Tidak banyak unggahan yang menggunakan bahasa campuran dalam akun Kunafe. Adapun bentuk campur kode yang ditemukan hanya satu atau dua kata dalam setiap kalimat dan bahasa Indonesia





masih mendominasi promosi produk Bandung Kunafe. Bahasa daerah terlihat lebih banyak digunakan daripada bahasa Inggris, tetapi untuk penamaan produk, bahasa Inggris masih mendominasi produk kue artis ini.

Pemegang akun resmi Bandung Kunafe memberikan informasi terkait sistem pemasaran dalam akun ini. Sama halnya seperti kue artis lainnya, iklan produk ini terbagi ke dalam *hard selling* dan *soft selling*. Admin akun resmi tidak menyadari bahwa pemilihan bahasa sangat penting. Target pasar produk ini adalah segenap masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia mendominasi promosi pemasaran. Sementara itu, bahasa Sunda pun digunakan karena produk ini berasal dari Bandung yang notabene masyarakatnya berbahasa Sunda.

#### e. Madinah Cake

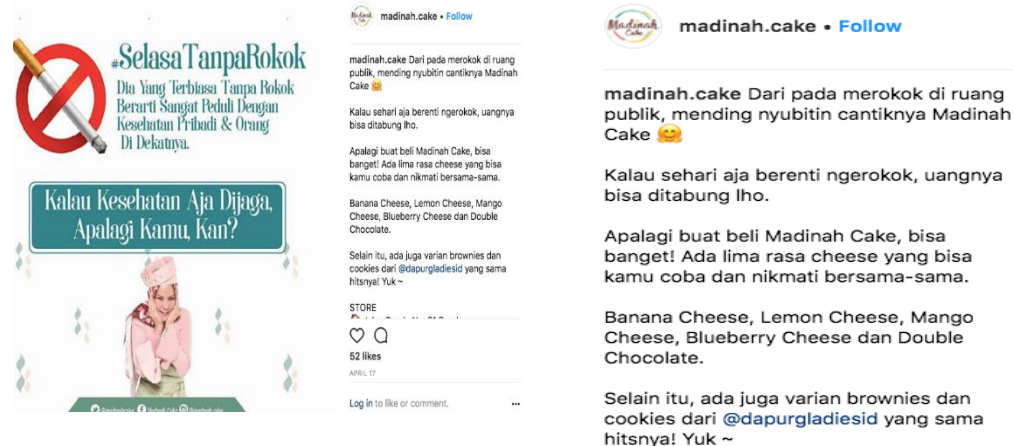
Dari data tertanggal 26 Februari 2018, *Madinah Cake* sudah mengunggah 501 foto, dengan pengikut sebanyak 9.717 akun Instagram.



**Grafik 5**  
**Madinah Cake**

Bahasa yang dominan dipakai dalam pemasaran kue *Madinah Cake* ini adalah bahasa Indonesia dengan hasil persentase 96% dan bahasa Inggris 0,51%. Bahasa Sunda tidak digunakan sama sekali dalam pemasaran *Madinah Cake* dan bahasa campuran sebanyak 3,58%. Nama produk kue yang dipasarkan dalam *Madinah Cake* ini 100% menggunakan bahasa Inggris.

Selain mengunggah penjualan produk atau promosi produk langsung, akun Instagram *Madinah Cake* banyak mengunggah promosi produk melalui layanan promosi yang berupa ucapan, pengumuman, kompetisi, promosi, hadiah, kuis, permainan, rekomendasi, dan sepak bola. Dalam postingan di akun Instagram *Madinah Cake* terdapat banyak ucapan islami yang sesuai dengan nama produknya, tetapi tidak ada ciri bahasa Sunda yang sesuai dengan tempat penjualan *Madinah Cake* yang berlokasi di daerah Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Produk kue ini terbilang baru dipasarkan di Kota Bandung. Target utama pemasaran adalah masyarakat Indonesia sehingga bahasa Indonesia masih mendominasi pemasaran kue ini. Tidak terlepas dari bentuk campur kode, campur kode yang terjadi adalah campur kode ke luar (*outer code mixing*). Berikut ini adalah unggahan dari akun *Medinah Cake*.



**Gambar 7**  
**Madinah Cake**

“Ada lima rasa *chesse* yang bisa kamu coba dan nikmati bersama-sama. ***Banana cheese, bluberry Cheese*** dan ***double Chocolate***”. Kata dalam bahasa Inggris bercampur dalam kalimat berbahasa Indonesia. Hampir sama dengan akun kue artis lainnya, Instagram produk ini banyak mengunggah informasi selain pemasaran produk kue, seperti informasi kesehatan, keagamaan, dan lingkungan.

**f. Ceata Cake**

*Ceata Cake* terhitung baru mendirikan usaha kue ini sehingga belum terlalu banyak produk yang diunggah pada akun Instagramnya. Dari data 26 Februari 2018, terlihat 32 unggahan yang memenuhi akun instagram *Ceata Cake*.



**Grafik 6**  
**Ceata Cake**

Bahasa yang mendominasi *Ceata Cake*, yaitu bahasa Indonesia sebanyak 68,75%. Iklan di Instagram kue ini sama sekali tidak menggunakan bahasa Sunda, sedangkan penggunaan bahasa Inggris sebanyak 12,50%. Bahasa campuran hanya digunakan sebanyak 18,75%. Tidak berbeda dengan produk lainnya, *Ceata Cake* membagi sistem penjualannya ke dalam dua bagian, yaitu promosi produk langsung (*hard selling*) dan promosi produk melalui layanan promosi (*soft selling*). Bahasa Indonesia masih menjadi primadona. Berikut ini salah satu contoh bahasa campuran dalam akun Instagram *Ceata Cake*.

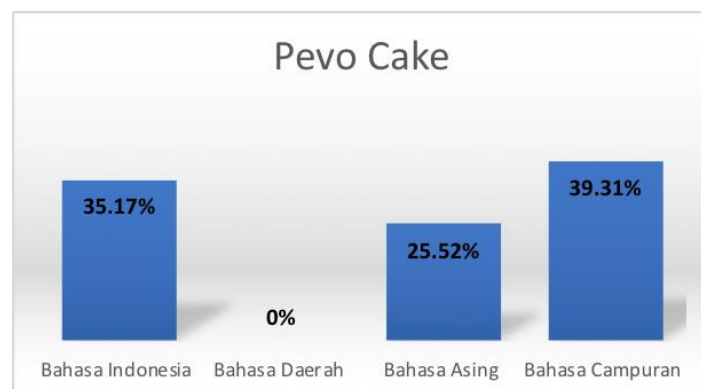


**Gambar 8**  
*Ceata Cake*

Penamaan produk semuanya menggunakan bahasa Inggris. Dengan demikian, bentuk campur kode yang terlihat dalam akun ini adalah campur kode ke luar (*outer code mixing*). Sangat disayangkan, penamaan produk ataupun rasa dari kue itu sendiri yang lebih memilih bahasa Inggris, misalnya, *Ceata Choco Banana* dinilai lebih bergensi dari pada Ceata coklat pisang.

**g. Pevo Cake**

Dari data tertanggal 26 Februari 2018, *Pevo Cake* sudah mengunggah sebanyak 145 foto.



**Grafik 7**  
*Pevo Cake*

Bahasa yang dominan dalam produk *Pevo Cake* adalah bahasa Indonesia sebanyak 35,17%, bahasa Inggris sebanyak 25,52%, dan bahasa campuran sebanyak 39,31%. Unggahan di Instagram tidak menggunakan bahasa Sunda sama sekali. Sama seperti produk lainnya, *Pevo Cake* membagi sistem pemasarannya ke dalam dua bagian, yaitu promosi produk langsung dan promosi produk melalui layanan promosi. Pada *Pevo Cake*, bahasa Inggris lebih banyak frekuensi penggunaannya dan hampir berimbang dengan bahasa Indonesia. Dalam setiap unggahannya pasti bahasa Inggris terselip dalam kontruksi bahasa Indonesia, seperti contoh di bawah ini.



**Gambar 9**  
**Pevo Cake**

***Have a nice day*** Pevolovers!jaga kesehatan dan jangan lupa selalu bangga dan sambut hari esok dengan senyuman!

Dari unggahan di atas terlihat bahwa bahasa Inggris selalu menjadi utama di samping deskripsi foto yang menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ditemukan bahasa Sunda dalam setiap unggahannya walaupun pemasaran kue ini ada di Bandung. Penamaan produk semuanya menggunakan bahasa Inggris.

## **PENUTUP**

Hasil analisis terhadap tujuh toko kue artis di kota Bandung adalah sebagai berikut. Bahasa yang mendominasi setiap unggahan produk di Instagram adalah bahasa Indonesia yang diikuti oleh penggunaan bahasa campuran (bahasa Indonesia-bahasa Sunda), (bahasa Indonesia-Inggris), dan bahasa Sunda dan bahasa asing (Inggris). Masyarakat Jawa Barat merupakan masyarakat bilingual sehingga campur kode dimungkinkan terjadi. Penguasaan kedua bahasa yang sama baiknya menyebabkan terjadinya penggunaan bahasa yang bercampur tanpa disadari penuturnya. Namun, dalam kasus media tulis, seperti dalam wawancara, penggunaan campur kode tersebut bertujuan untuk menjalin keakraban. Bentuk campur kode dalam setiap unggahan kue artis adalah campur kode ke dalam, campur kode ke luar, dan campur kode campuran.

Orang yang bertanggung jawab dalam unggahan tersebut adalah seorang admin. Beberapa toko kue artis menyebutkan sang artis ikut berdiskusi mengenai bahasa untuk iklan produknya, tetapi ada pula artis yang melimpahkan kepercayaan kepada adminnya. Dari sikap bahasa pemilik usaha, terlihat penggunaan bahasa Indonesia masih mendominasi proses promosi produk karena sasaran penjualan produk kue tersebut adalah ke seluruh penjuru Indonesia. Sementara itu, penggunaan bahasa Sunda, sekalipun tidak banyak, ditujukan untuk identitas produk yang berasal dari Jawa Barat. Bahasa asing (Inggris) sangat sedikit digunakan karena melihat target pasar. Walau demikian, penamaan produk masih murni menggunakan bahasa Inggris.

Pemertahanan bahasa bisa dilakukan salah satunya dalam bidang bisnis/usaha. Proses tersebut terlihat dari penggunaan bahasa dalam promosi produk di media sosial seperti instagram, antara lain untuk usaha kue artis yang saat ini sedang naik daun. Namun, di sisi lain penggunaan bahasa yang tidak baik bisa menyebabkan kesalahpahaman, seperti kasus campur kode dalam berbagai unggahan kue artis



tersebut. Walaupun bahasa Indonesia masih mendominasi teks promosi produk, penggunaan bahasa campuran berada di posisi kedua setelah bahasa Indonesia. Tujuan penggunaan campur kode tersebut, baik bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda maupun bahasa Indonesia dengan bahasa asing, adalah untuk menjalin keakraban dengan konsumen. Alasannya adalah target ketujuh kue artis tersebut adalah konsumen remaja hingga dewasa.

Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini, yang dilanjutkan dengan sosialisasi yang serius, seperti yang diungkapkan Marsudi (2015), penggunaan bahasa campuran bisa diminimalisasi karena apabila didiamkan, kesalahpahaman struktur bahasa dapat terjadi.

Kim (2006) mengatakan bahwa campur kode tidak terelakkan manakala penutur bilingual (memahami dan menggunakan dua bahasa dalam kehidupannya). Adapun tujuan penggunaan campur kode dalam semua pemasaran kue artis di Kota Bandung adalah menjalin keakraban, membuat suasana lebih santai, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu formal agar warganet betah berlama-lama membaca setiap unggahan. Akan tetapi, peneliti khawatir pemahaman struktur kaidah kebahasaan keliru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Backus, Ad. (2005). Codeswitching and Language Change: One thing leads to another?. *International Journal of Bilingualism' Volume 9 Number 3 & 4 2005*, 307-340.
- Bahasa Asing Ancam Bahasa Indonesia dan Lokal*.  
<https://news.okezone.com/read/2011/07/22/373/482901/bahasa-asing-ancam-bahasa-indonesia-dan-lokal>
- Ilham, Intan F. (2017). Maraknya Kuliner (Tidak Khas Daerah) Buatan Para Artis dalam [https://www.kompasiana.com/www.ntanfirdausi.com/maraknya-kuliner-tidak-khas-daerah-buatan-para-artis\\_5879133622afbfd00a613051](https://www.kompasiana.com/www.ntanfirdausi.com/maraknya-kuliner-tidak-khas-daerah-buatan-para-artis_5879133622afbfd00a613051)
- Khasanah, Ismatul, dkk. (2015). Fenomena Penggunaan Bahasa Asing dalam Penamaan Bisnis Kuliner di Kawasan Soekarno Hatta Kota Malang. *Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) Edisi 2 No. 1, Jan – Mar 2015, p.01 – 11 ISSN: 2355-4118*.
- Kim, Eunhee. (2006). Reasons and Motivations for Code-Mixing and Code-Switching. *Spring 2006 Issues in EFL Vol.4 No.1*.
- Lencek, 1990. The Dimensions of Sociolinguistic Language Attitude. <https://journals.lib.washington.edu/index.php/ssj/article/download/3840/3251>
- Marsudi, Siti Zahrok. (2015). Kesetiaan Berbahasa Indonesia Dipertanyakan di Era Globalisasi. *jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8 No.1, Juni 2015*.
- Melander, Linda. (2003). Language Attitudes Evaluational Reactions to Spoken Language.  
<http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:518098/FULLTEXT01.pdf>
- Nurjanah, Nunuy dan Widyastuti Temmy. (2017). Ungkapan Bahasa Sunda dalam Strategi Pemasaran Kue Artis di Kota Bandung (Analisis Pragmatik). *Prosiding Konferensi Internasional Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia (IKADBUDI 2017): Penguatan Budaya Lokal sebagai Peneguh Multikulturalisme melalui Toleransi Budaya*.



- Redaktur Kompas. (2017). Pemertahanan dan Kontribusi Budaya Ditinggalkan. *Kompas* edisi 20 Desember 2017.
- Septia, Emil. (2017). Bahasa Pedagang Etnis Cina dalam Interaksi Jual Beli di Pasar Pondok Kota Padang: Kajian Sociolinguistik. *Jurnal Gramatika, Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia V3.i1 (1-8)*.
- Suara.com. (2017). Tren Kue Kekinian Artis Hanya Bertahan Dua Tahun. <https://www.suara.com/lifestyle/2017/11/09/173530/tren-kue-kekinian-artis-hanya-bertahan-dua-tahun>
- Sumarsih, dkk. (2014). Code Switching and Code Mixing in Indonesia: Study in Sociolinguistics. *English Language and Literature Studies; Vol. 4, No. 1*.
- Sutrismi. (2014). The Use of Indonesian English Code Mixing In Social Media Networking (Facebook) By Indonesian Youngsters. [http://eprints.ums.ac.id/29788/16/PUBLICATIONS\\_ARTICLE.pdf](http://eprints.ums.ac.id/29788/16/PUBLICATIONS_ARTICLE.pdf)
- Sholikhah, dkk. (2018). Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Karangan Tentang Perjalanan Siswa Kelas VIII MTSN Model Trenggalek. <http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel140035D25DA09DFDF66C869B4E482145E.pdf> diunduh tanggal 8/4/2018.
- Tempo.co. (2018). Penyederhanaan Tata Niaga Impor, Pengusaha Harus Siapkan ini. <https://bisnis.tempo.co/read/1072147/penyederhanaan-tata-niaga-impor-pengusaha-harus-siapkan-ini>
- Uterogroup.com. (2018). Intip Strategi Marketing “Perang Kue Artis” <http://www.uterogroup.com/news/intip-strategi-marketing-perang-kue-artis.app>



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sidang Panel Sesi 1 Ruang 4**

Pembicara : Dr. Tri Indri Hardini

Judul makalah : “Peran Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing dalam Strategi Pemasaran Kue Artis di Kota Bandung”

Hari, tanggal : Senin, 29 Oktober 2018

Pukul : 08.00—09.30

Moderator : Dr. Felicia Utorodewo

Pencatat : 1. Purwaningsih  
2. Ferdinandus Moses  
3. Kunkun Purwati

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Tidak ada aturan bahasa pada proses jual-beli dalam media internet.
2. Unggahan iklan kue artis banyak menggunakan campur kode dalam berkomunikasi, yaitu bahasa Indonesia, Sunda, dan Inggris. Bahasa untuk memasarkan suatu produk dinilai tidak beraturan. Ketidakberaturan tersebut terlihat dari campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah (Sunda) serta antara bahasa Indonesia dan bahasa asing (Inggris). Selain itu, dari struktur bahasanya pun tidak sedikit yang tidak gramatikal. Pada unggahan iklan kue artis campur kode dilakukan dalam satu kalimat.
3. Akhirnya, banyak anak-anak yang meniru dalam penggunaan campur kode tersebut dan mereka tidak terganggu dengan unggahan bahasa campur kode tersebut.
4. Campur kode yang dilakukan pemasaran kue artis menjadi kekhawatiran pada pemahaman struktur kaidah kebahasaan yang keliru. Hal ini dipicu karena banyak anak-anak muda yang mengikuti pola tersebut.
5. Strategi pemasaran dengan campur kode dilakukan agar produk ini dapat dijual dengan cepat dan laris di pasaran Kota Bandung.
6. Peran bahasa Sunda yang digunakan pada iklan kue tersebut sebagai identitas wilayah Sunda, sedangkan bahasa Inggris digunakan untuk target pasar agar memiliki daya tarik.
7. Bentuk campur kode dalam setiap unggahan kue artis adalah campur kode ke dalam, campur kode ke luar, dan campur kode campuran.
8. Tujuan penggunaan campur kode tersebut, baik bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda maupun bahasa Indonesia dengan bahasa asing, adalah untuk menjalin keakraban dengan konsumen karena target ketujuh kue artis tersebut adalah konsumen remaja hingga dewasa.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Yayah Lumintaintang

Instansi : Pensiunan Badan Bahasa



**Pertanyaan:**

Campur kode itu dulu diwadahi oleh Mabbim dalam bentuk terminologi. Bentuknya adalah frasa, tidak memiliki motif, tetapi hanya sekadar informasi saja. Topik kuliner memang tidak diatur dalam aturan berbahasa.

**Jawaban:**

Kami mengangkat tema ini karena sedang marak di Bandung dan anak-anak banyak yang mencontoh. Anak-anak itu memang suka meniru dan ini akan menimbulkan kekhawatiran akan perkembangan berbahasa nantinya. Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan pada masalah kebahasaan yang sekarang kita hadapi.

**Penanya 2**

Nama : Heri Kurniawan  
Instansi : Ikatan Jurnalisme Indonesia; Pemerhati Papua

**Pertanyaan:**

Pola promosi penjualan kue di Bandung sama. Apakah kondisi ini menunjukkan bahasa Indonesia semakin buruk atau dalam proses menuju keseimbangan dalam membentuk bahasa baku?

**Jawaban:**

Tidak terpuruk, kita harus optimistis. Yang dibutuhkan adalah sikap berbahasa yang baik. Ada baiknya para artis ini diberikan pemahaman tentang penggunaan bahasa dan sikap berbahasa. Hal itu dapat dilakukan dimulai dari keluarga. Anak-anak sekarang sudah mengalami xenomania dan kegengsian menggunakan bahasa daerah.

**Penanya 3**

Nama : Debi Sianturi  
Instansi : Jakarta

**Pertanyaan:**

Artis hanya mencari popularitas, tidak memperhatikan bahasa yang baik. Bagaimana dengan hal ini, Bu?

**Jawaban:**

Seperti yang saya sampaikan, unggahan produk kue milik para artis hanya sekadar untuk menarik minat beli masyarakat. Karena itu, perlu para artis tersebut diberikan penyuluhan berbahasa. Selain itu, ketiadaan aturan yang mengikat mengakibatkan hal ini cenderung dibiarkan.

**Penanya 4**

Nama : Elisabeth  
Instansi : Universitas Manokwari, Papua Barat

**Pertanyaan:**

Kita dihadapkan pada suatu dilema dalam strategi pemasaran. Kekhawatiran pada ranah media bahasa, sedangkan strategi pemasaran menuntut sesuatu produk laris





dan laku. Bahasa Inggris memiliki nilai ekonomi. Bagaimana kita menghadapi hal ini?

**Jawaban:**

Bahasa dan ekonomi memang saling bertentangan (ambivalen). Bisa kita gunakan bahasa santai, tidak dilakukan campur kode. Bisa disesuaikan dengan kepentingan pembuatan produk.

**Isu-Isu Penting:**

Penggunaan campur kode dalam dunia bisnis kuliner di Kota Bandung sudah merambah ke masyarakat. Akhirnya, banyak anak-anak remaja yang meniru penggunaan campur kode tersebut. Ada baiknya hal ini ditertibkan karena adanya kekhawatiran terhadap pemahaman struktur kaidah kebahasaan yang keliru.



## 9. Larangan Membuang Sampah: Potret Budaya Masyarakat melalui Pemakaian Bahasa Indonesia di Ruang Publik

### LARANGAN MEMBUANG SAMPAH: POTRET BUDAYA MASYARAKAT MELALUI PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

*No Littering Signs:*

*The Portrait of Community Culture Through the Use of Indonesian Languages in the Public Space*

**Wira Kurniawati**

Universitas Gadjah Mada  
wirakurniawati@ugm.ac.id

#### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan menguraikan budaya masyarakat dalam memakai bahasa Indonesia yang tergambar dari berbagai larangan membuang sampah. Larangan tersebut dapat kita jumpai di ruang publik sebagai reaksi atas budaya membuang sampah sembarangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati papan dan spanduk larangan membuang sampah di sebagian wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta dan dengan mengunduh sejumlah gambar papan larangan dan spanduk melalui google.com. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan jenis ragam bahasa Indonesia yang digunakan, analisis kesalahan berbahasa Indonesia yang ada, serta identitas masyarakat yang tecermin dari pemakaian bahasanya. Hasilnya menyimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam larangan membuang sampah dapat berupa ragam formal, konsultatif, dan santai yang disampaikan secara konvensional dan tidak konvensional. Dalam pemakaiannya terdapat berbagai kesalahan baik dari sisi ejaan, kebakuan kosakata, diksi, hingga struktur bahasa yang berdampak pada ketidakefektifan penyampaian ide. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki preferensi kebahasaan yang berorientasi pada kehendak sosiokultural yang dominan serta berusaha berbeda dari yang lain dengan menegaskan dan mencerminkan keunikan mereka, yang sebagian di antaranya menunjukkan ketidakpedulian pada pemakaian bahasa.

**Kata-kata kunci:** pemakaian bahasa Indonesia, larangan membuang sampah, budaya masyarakat, ruang publik

#### **Abstract**

*This paper intends to describe the culture of the people in using the Indonesian language reflected from the various no littering signs. No littering signs can be encountered in the public sphere as a reaction to the culture of littering. Data collection is done by observing banning boards and banners in some areas in Sleman Regency, Yogyakarta and downloading various images of ban boards and banners through google.com. The analysis is conducted qualitatively based on the type of Indonesian language used, the analysis of existing language errors, and the identity of the community reflected. The results concluded that the Indonesian language used in the no littering signs is a formal, consultative, and casual variation that is conventionally and unconventional. There are various errors both*



*from the side of spelling, vocabulary, diction, to language structure that affects the ineffectiveness of the delivery of his ideas. From this it can be seen that the community has linguistic preferences oriented to the dominant sociocultural will and strives to be different from others by asserting and reflecting their uniqueness, some of which show ignorance to the use of language.*

**Keywords:** *use of Indonesian language, no littering signs, community culture, public space*

## **PENDAHULUAN**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>), *sampah* didefinisikan sebagai ‘barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya; kotoran’. Oleh karena sudah tidak terpakai lagi, orang lalu akan membuangnya. Sebenarnya ada petugas kebersihan yang oleh pemerintah ditugasi membantu membersihkan sampah produksi masyarakat tersebut, tetapi permasalahan sampah tidak akan selesai jika hanya ditangani pemerintah dengan petugas kebersihannya tanpa peran serta aktif masyarakat turut membuang sampah dengan baik.

Volume sampah yang dihasilkan masyarakat dapat dikatakan besar. Di Jakarta saja (<https://news.detik.com>), misalnya, setiap hari masyarakat memproduksi 7.000 ton sampah. Jika produksi sampah ini tidak diikuti dengan budaya membuangnya dengan baik, hal ini kemudian dapat menjadi masalah serius bahkan menimbulkan bencana. Salah satu masalah yang paling ringan adalah kotornya lingkungan yang mengganggu keindahannya. Karenanya, tidak jarang ruang-ruang publik di Indonesia kemudian dihiasi atau malah semakin dikotori oleh larangan membuang sampah sembarangan. Larangan tersebut dapat dituangkan dalam tempelan kertas, poster, papan, hingga spanduk yang dibuat oleh individual, kelompok warga, lembaga, atau dinas tertentu, atau oleh pemerintah (daerah).

Di berbagai tempat, budaya membuang sampah yang tidak baik ini mengakibatkan papan larangan membuang sampah hanya menjadi pajangan karena masyarakat tidak peduli akan keberadaannya. Oleh karena itu, individu, kelompok masyarakat, atau pun suatu lembaga yang *jengah* akan budaya membuang sampah sembarangan ini terdorong membuat papan larangan membuang sampah secara unik. Untuk ini, ada berbagai konteks yang disertakan dalam penulisannya, misalnya, peraturan pemerintah dan undang-undang, sanksi pelanggaran, lelucon, satire, atau tidak jarang malah dijumpai makian yang sarkastik. Pemakaian bahasa dalam papan larangan membuang sampah ini dapat menunjukkan identitas budaya suatu masyarakat.

Bahasa menjadi identitas sekaligus jati diri suatu bangsa. Bahasa Indonesia merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia semenjak dicetuskan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam UU RI No. 24 Tahun 2009 khususnya Pasal 26 sampai 40 secara jelas dibahas kewajiban menggunakan bahasa Indonesia. Pasal 3 berisi tentang pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang bertujuan untuk: a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Menurut



UU ini, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Adapun ruang publik berfungsi sebagai pusat kegiatan tempat masyarakat melakukan aktivitasnya.

Oleh karena itu, papan larangan membuang sampah di area publik menjadi sumber data dalam tulisan ini. Dalam tulisan ini diuraikan budaya masyarakat yang tecermin dari pemakaian bahasa Indonesia dalam papan larangan membuang sampah. Untuk itu, dirumuskan tiga permasalahan, yaitu (1) bagaimana ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam papan larangan membuang sampah; (2) bagaimana kesalahan berbahasa yang dijumpai dalam papan larangan membuang sampah itu; dan (3) bagaimana budaya masyarakat yang tecermin dalam pemakaian bahasa Indonesia dalam papan larangan membuang sampah sembarangan tersebut.

Ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Susanti (2014) yang menganalisis kesalahan berbahasa pada tulisan di media luar ruang di Kota Klaten menyatakan bahwa kesalahan itu meliputi kesalahan tanda baca, penggunaan singkatan, penulisan huruf kapital, serta pemilihan kata. Media luar ruang yang dimaksud Susanti adalah media yang dapat dijumpai di luar ruangan, seperti papan nama pertokoan, papan nama instansi, baliho, dan spanduk.

Sementara itu, berkaitan dengan sistem ejaan, Pastika (2012) mengkaji kelemahan sistem fonologis dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Menurutnya, sebagian kosakata bahasa Indonesia perlu disempurnakan untuk mendapatkan bentuk yang lebih berterima, baik dari segi linguistik maupun dari segi penuturnya. Pastika (2012) berpendapat bahwa sejumlah kata yang masih digunakan secara bersaing oleh penutur bahasa Indonesia terjadi karena kaidah morfofonologis tidak selalu dapat diterima oleh masyarakat. Karena itu, ia menyarankan organisasi struktural dan akademik menerapkan kaidah secara ajek sehingga lambat laun masyarakat akan mengikutinya.

Ada sejumlah jenis makian yang dijumpai dalam papan larangan membuang sampah. Fasya dan Suhendar (2013) mengkaji variabel sosial sebagai penentu penggunaan makian dalam bahasa Indonesia. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel sosial menjadi penentu penggunaan makian dalam bahasa Indonesia, baik dalam bentuk lingual maupun referensi makiannya. Hal tersebut mengindikasikan karakteristik dan latar belakang dari pemakainya. Perbedaan kelas sosial tersebut ditandai dengan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta usia pemakai bahasa. Penggunaan makian dengan referensi binatang cenderung ditunjukkan responden berpendidikan rendah dan bekerja bukan sebagai PNS. Lingkungan tempat kerja disebut menjadi faktor yang memengaruhi penggunaan makian. Jenis kelamin dan usia juga ternyata menjadi penentu penggunaan makian, karena laki-laki berusia muda lebih dominan memaki menggunakan referensi binatang.

## **LANDASAN TEORI**

Salah satu teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori ragam bahasa. Manusia diciptakan heterogen sehingga bahasa yang mereka gunakan sangat bergantung pada beragam konteks yang melatarbelakanginya. Dalam sosiolinguistik Holmes (1992) mengemukakan bahwa setidaknya variasi bahasa dapat terbentuk karena perbedaan aspek regional dan sosial, jenis kelamin dan usia, serta etnisitas dan jaringan sosial. Adapun Martin Joss (dalam Coupland, 2007)



mengemukakan hierarki ragam bahasa lisan dan tulis ke dalam lima level, yaitu ragam beku, formal, konsultatif, kasual, dan intim/akrab. Ragam beku merupakan ragam yang paling formal, biasanya digunakan pada situasi-situasi khidmat, upacara-upacara resmi, dalam undang-undang, dan sebagainya. Adapun ragam formal merupakan variasi bahasa yang ditetapkan secara mantap sebagai suatu standar. Ragam konsultatif merupakan ragam yang paling operasional karena berada di antara ragam formal dan ragam informal yang berorientasi pada hasil. Sementara itu, ragam kasual merupakan ragam yang digunakan dalam situasi tidak resmi. Terakhir, ragam intim atau akrab digunakan para penutur yang mempunyai hubungan akrab.

Sementara itu, dalam kaidah bahasa Indonesia ada *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, dan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* yang dapat menjadi acuan dalam menentukan standar pemakaian bahasa yang benar. Dengan kata lain, standar pemakaian bahasa Indonesia yang benar adalah yang sesuai dengan yang dituangkan dalam beberapa acuan tersebut.

Untuk mengetahui identitas kultural masyarakat yang tampak dari pemakaian bahasa Indonesia dalam larangan membuang sampah sembarangan, perpaduan sudut pandang psikologi dan antropologi dipakai dalam tulisan ini. Ekspresi diri memungkinkan orang membedakan diri dari orang lain, mencerminkan keyakinan dan kebutuhan mereka sendiri, dan memvalidasi konsep-diri mereka sendiri. Berdasarkan hal ini psikologi diarahkan untuk lebih memahami dan meningkatkan pengetahuan tentang diri dengan mempelajari manifestasinya melalui tindakan. Adapun penelitian tentang perilaku menunjukkan bahwa orang mencoba mencerminkan dan meningkatkan citra individu, otonomi, dan pemberdayaan diri dalam pilihan mereka (Belk, 1988; Han dan Shavitt, 1994). Selain itu, orang-orang dapat saja mengekspresikan identitas dirinya melalui pilihan dan preferensi mereka untuk objek dan opini (Prentice, 1987). Individu mendukung kepemilikan, sikap, dan nilai-nilai identitas pribadi yang diwujudkan (Prentice, 1987) dan berusaha berbeda dari yang lain untuk menegaskan dan mencerminkan keunikan mereka sendiri (Ratner dan Kahn, 2002). Belk (1988) berpendapat bahwa hal itu merupakan refleksi diri terhadap pilihan yang memungkinkan terjadinya manifestasi atas preferensi kultural. Dengan kata lain, pilihan dalam budaya mencerminkan aspirasi proyektif yang terwujud dalam realitas tindakan. Ekspresi diri ini juga memungkinkan upaya reflektif dari manifestasi tindakan seseorang.

## **METODE PENELITIAN**

Pengumpulan data larangan membuang sampah ini dilakukan dengan mengamati papan dan spanduk larangan membuang sampah di sebagian wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta dan dengan mengunduh sejumlah gambar papan larangan dan spanduk melalui google.com. Papan dan spanduk larangan membuang sampah yang ditemukan di sebagian wilayah Kabupaten Sleman difoto kemudian ditranskripsi secara ortografis. Sementara itu, data dari situs google.com dilakukan dengan menuliskan kata kunci *larangan membuang sampah*. Ada banyak gambar yang kemudian muncul, tetapi untuk membatasi ruang lingkupnya, gambar-gambar yang berupa *meme* tidak dipilih. Dengan kata lain, gambar yang tampak berasal dari potret nyata larangan membuang sampah yang terpampang dalam realitas



kehidupan masyarakatlah yang dipilih. Data yang terkumpul kemudian ditranskripsi juga secara ortografis.

Klasifikasi kemudian dilakukan berdasarkan jenis ragam bahasa Indonesia yang digunakan, jenis kesalahan berbahasa Indonesia yang ada di dalamnya, serta identitas masyarakat yang tecermin dari pemakaian bahasanya tersebut. Selanjutnya, dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dan introspektif.

## PEMBAHASAN

### 1. Ragam Bahasa dan Tingkat Konvensionalitasnya

Martin Joss (dalam Coupland, 2007) mengemukakan hierarki ragam bahasa lisan dan tulis bahasa Inggris ke dalam lima tingkat, yaitu ragam beku, formal, konsultatif, kasual, dan intim/akrab. Jika dilihat dari tingkat hierarki itu, ada tiga jenis ragam bahasa yang dijumpai pada data larangan membuang sampah, yaitu formal, konsultatif, dan kasual. Larangan membuang sampah secara formal disampaikan menggunakan bahasa Indonesia ragam formal, sedangkan konsultatif menggunakan ragam semiformal, sedangkan yang santai menggunakan ragam tidak resmi. Sementara itu, jika dilihat dari tingkat konvensionalitasnya, ada dua jenis konvensionalitas bahasa dalam larangan membuang sampah yang ditemukan dalam data penelitian, yaitu ragam konvensional dan tidak konvensional. Berikut uraiannya.

#### a. Tingkat Formalitas

Joss (dalam Coupland, 2007) menyatakan bahwa tingkatan formalitas berkaitan dengan intuisi tentang tingkat kedekatan antara penutur dengan mitra tutur. Dalam konteks ini, penutur yang dimaksud adalah penulis atau pihak pembuat/penanggung jawab papan larangan membuang sampah, sedangkan mitra tuturnya adalah pembaca, atau orang yang (punya kemungkinan) membuang sampah. Mengingat latar tempat yang beragam, tingkat formalitas yang berbeda dijumpai dalam data larangan membuang sampah.

Larangan membuang sampah beragam formal ditandai dengan pemakaian bahasa Indonesia ragam formal. Ragam formal bahasa Indonesia merupakan ragam yang mengikuti kaidah atau standar pemakaian bahasa Indonesia. Larangan berjenis formal ini umumnya dijumpai di tempat-tempat formal, seperti kantor, sekolah, atau tempat pelayanan umum, seperti terdapat dalam contoh berikut.

- (1) Terima kasih Anda sudah membuang sampah pada tempatnya.
- (2) Buanglah sampah di tempatnya.

Pemilihan kata *Anda* sebagai pronomina persona kedua dalam contoh (1) menunjukkan tingkat formalitas pemakaian bahasa Indonesia jika dibanding dengan sinonimnya, *kamu*. Sementara itu, pemakaian kata berimbuhan dalam *membuang* juga menunjukkan keformalan karena dalam komunikasi tidak formal imbuhan *meN-* biasanya ditanggalkan. Selain itu, struktur kalimatnya juga sesuai dengan kaidah formal pemakaian bahasa Indonesia. Adapun pada contoh kedua, pemakaian partikel *-lah* menunjukkan bahwa ada tujuan penghalusan dalam pemakaian ragam formal ini.

Sementara itu, ragam konsultatif dalam papan larangan membuang sampah ditandai dengan pemakaian bahasa yang ada di antara ragam formal dan ragam informal, yang berorientasi pada hasil. Hal ini tampak dalam contoh berikut ini.

- (3) Jangan buang sampah sembarangan. Sungai bukan tempat sampah.  
Warga berhak menghakimi orang yang buang sampah disini.



- (4) Dilarang buang sampah di sungai. Kelurahan Pandaan.

Pemakaian kata kerja tak berimbuhan dalam kata *buang* menjadi ciri utama dalam ragam konsultatif ini. Selain itu, pemilihan diksi *warga* dalam contoh (3) dan pencantuman keterangan pembuat papan larangan *Kelurahan Pandaan* pada contoh (4) menandakan bahwa papan larangan dibuat oleh kelompok warga atau pamong yang pada umumnya adalah kelompok yang menggunakan ragam konsultatif dalam komunikasi.

Sementara itu, ragam santai dalam pemakaian bahasa Indonesia di papan larangan pembuangan sampah tampak dalam pemakaian kata ajakan *yuuk*, kata kerja *buang*, serta pemakaian pronomina *aku* dan *kamu* dalam contoh (5) berikut. Adapun pada contoh (6) tampak situasi tidak resmi dibangun dengan memanfaatkan pemilihan topik *mantan* dan pemakaian pronomina *kamu*.

- (5) Yuuk... *Buang* sampah pada tempatnya. Warga 04 Petemon Kuburan.  
Siapapun: *aku, kamu, kita* semua  
(6) *Kamu* yakin buang sampah lebih susah dari *buang* mantan?

### **b. Tingkat Konvensionalitas**

Larangan membuang sampah yang disampaikan secara konvensional dalam tulisan ini merupakan larangan membuang sampah yang lazim, biasa, lumrah, atau umum dijumpai atau dipakai oleh masyarakat. Biasanya larangan yang konvensional ini memanfaatkan ragam bahasa formal. Selain itu, larangan konvensional ini sebagaimana lazimnya, memanfaatkan kata *jangan, dilarang, atau stop* seperti pada contoh berikut.

- (7) *Jangan* buang sampah sembarangan!  
(8) *Dilarang* membuang sampah di lingkungan ini  
(9) *Stop* buang sampah sembarang

Selain itu, ada juga yang menggunakan tindak tutur tidak langsung, yakni dengan menggunakan kalimat berita untuk maksud direktif (dalam hal ini melarang). Misalnya, adalah ucapan terima kasih, seperti pada contoh berikut.

- (10) *Terima kasih* untuk tidak membuang sampah di lokasi ini.

Ucapan terima kasih biasanya diberikan setelah seseorang memberikan atau melakukan sesuatu sebagaimana seharusnya. Dengan demikian, praanggapan bahwa pembaca sudah melakukan sesuatu seperti yang diharapkan, yaitu tidak membuang sampah di lokasi tersebut, dimanfaatkan untuk membangun keyakinan dan kepercayaan oleh si pembuat larangan terhadap pembacanya.

Selain beberapa penggunaan kata di atas, ditemukan juga larangan yang berupa imbauan seperti contoh berikut.

- (11) Jagalah kebersihan.

Ada juga yang berupa anjuran sebagaimana contoh (12) berikut.

- (12) Buanglah sampah pada tempatnya

Juga ada yang merupakan gabungan dari imbauan dan anjuran atau anjuran dan pernyataan seperti berikut.

- (13) Jagalah kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya.  
(14) Buanglah sampah pada tempatnya. Bersih itu sehat.

Pemakaian kata *jagalah* dan *buanglah* pada beberapa contoh di atas sangat lazim dijumpai pemanfaatannya dalam papan larangan membuang sampah di tempat-tempat formal.



Jenis yang kedua adalah larangan yang tidak konvensional. Yang dimaksud dengan tidak konvensional dalam tulisan ini adalah bahwa larangan membuang sampah disampaikan dengan cara yang khas atau spesifik dengan mengeksplorasi daya kreativitas dari para pembuatnya. Kreativitas ini dapat dilihat dari pemakaian bahasa yang memanfaatkan berbagai konteks. Jenis larangan yang tidak konvensional ini ada yang berupa larangan atau ajakan sebagaimana terdapat dalam bentuknya yang konvensional tetapi disampaikan menggunakan ragam bahasa yang santai, ada juga yang disampaikan dengan ancaman, doa, keterangan tambahan berupa pengecualian, sanksi, atau denda.

Seperti pada contoh berikut, pemanfaatan konteks agama digunakan untuk membujuk masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, yakni dengan memanfaatkan diksi *orang beriman*. Dengan demikian, orang yang membuang sampah sembarangan tidak tergolong dalam kelompok ini. Sementara itu, pada contoh berikutnya, pemanfaatan konteks doa digunakan untuk menggolongkan orang yang tidak membuang sampah sembarangan ke dalam kelompok penghuni surga sehingga orang yang membuang sampah sembarangan tidak masuk dalam golongan ini.

(15) *Orang beriman* membuang sampah pada tempatnya.

(16) *Yaa Allah*

*Jadikanlah* orang-orang yang tidak membuang sampah di sekitar lokasi ini sebagai penghuni taman-taman surgamu

*Amin yaa rabbal alamin*

Pada contoh berikut ini, konsep *malu*, yaitu ‘perasaan segan atau tidak enak hati’ (<http://kbbi.kemdikbud.go.id>) digunakan untuk memengaruhi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan termasuk dalam perbuatan yang kurang baik atau kurang benar sesuai tatanan yang ada sehingga perasaan kurang enak hati dimanfaatkan dalam membangun latar sosialnya.

(17) *Malu dong* buang sampah sembarangan

Sementara itu, dalam beberapa contoh di bawah ini, pemanfaatan konteks hubungan atau relasi berdasarkan cinta kasih dimanfaatkan karena sesuai dengan pembuat dan target pembacanya. Kata-kata yang dimanfaatkan adalah *mantan*, *putus*, dan *jomblo*. Contoh-contoh ini tidak dapat digunakan di sembarang tempat dan tidak juga ditujukan untuk segala usia.

(18) Jangan cuma **MANTAN** yang dibuang, sampah juga!

(19) Kita *putus* kalau kamu buang sampah sembarangan

(20) Kamu yakin buang sampah lebih susah dari buang *mantan*?

(21) Buang sampah di hutan *jomblo* seumur hidup! Membaca berarti berdo’a

Adapun pada contoh-contoh berikut, pemanfaatan nama-nama binatang yang memiliki asosiasi negatif digunakan untuk menggolongkan orang-orang yang tidak menaati peraturan karena membuang sampah secara sembarangan ke dalam kelompok hewan-hewan tersebut. *Monyet* secara fisiologis merupakan entitas hewani yang dianggap sebagai kerabat dekat manusia. Adapun *babi* dan *anjing* termasuk golongan hewan najis dalam ajaran Islam sehingga pengasosiasian orang yang membuang sampah sembarangan dengan kedua hewan ini dimaksudkan sebagai larangan yang memiliki nuansa sangat sarkastik.

(22) *Monyet* aja tau ...!!! Sungai/kali bukan tempat sampah.

(23) Hanya *monyet* yang boleh buang sampah sembarangan.





(24) *Babi/anjing* boleh buang sampah di sekitar sini.

Dalam contoh berikut, konteks doa sekali lagi dimanfaatkan oleh para pembuat papan larangan membuang sampah sembarangan. Namun, berbeda dari contoh sebelumnya, doa dalam konteks ini justru dimanfaatkan untuk menunjukkan hal yang sangat berlawanan dengan tujuan doa pada umumnya. Jika pada umumnya doa digunakan untuk memanjatkan permohonan yang baik, dalam contoh-contoh berikut ini malah digunakan untuk menyumpahserapahi orang. Hal ini terlihat dari penggunaan (gabungan) kata *cabutlah nyawa* dan *celakalah*. Sumpah serapah berikutnya juga dimanfaatkan untuk melarang orang membuang sampah sembarangan, tetapi dengan menggunakan acuan pada diri sendiri agar orang yang membaca tergerak hatinya.

(25) *Ya Allah*

Mohon *cabutlah* segera nyawa mereka yang buang sampah di sepanjang got ini. Amiin.

*Celakalah* mereka para penjahat lingkungan

Pelanggar wajib bayar denda

Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede RT. 006 / RW. 001

(26) *Ya Allah ...*

*Cabutlah* nyawanya orang-orang yang membuang sampah di sepanjang jalan ini

Komunitas kebersihan

(27) *Ya Allah*

Aku *rela miskin* 7 turunan kalau buang sampah di sepanjang jalan ini.

Sementara itu, kejengkelan pembuat papan larangan membuang sampah tampak sekali dalam contoh berikut karena sumpah serapah yang disampaikannya menggunakan kata sarkastik, *mampus* alih-alih *meninggal*. *Tabrakan* dan *ketabrak* juga merupakan sumpah serapah yang dimanfaatkan. Barangkali tujuan pemakaiannya adalah agar orang berpikir ulang untuk membuang sampah sembarangan karena takut akan sesuatu hal.

(28) Yang buang sampah

*Tabrakan!!! Mampus*

(29) Yang buang sampah di sini mudah-mudahan pulangnya *ketabrak* mobil.

Dalam contoh berikut denda dan nominal rupiah yang dieksplisitkan, apalagi ditambah dengan *bonus hajar massa ngantek klenger* (*'bonus dihajar massa sampai tak berdaya'*) digunakan untuk mengancam para pembuang sampah sembarangan. Hal serupa, yaitu *golok akan bicara* juga digunakan untuk mengancam.

(30) Dilarang membuang sampah di tempat ini!!! Tempat ini dalam pengawasan. Barang siapa ketahuan membuang sampah di sini  
“*Didenda Rp 1.000.000,00*” *Bonus hajar Massa ngantek klenger ...!!!*

(31) Dilarang buang sampah di sini

Kalau Anda tidak mengerti *golok akan bicara!!!*

Sementara itu, konteks latar belakang pendidikan dimanfaatkan dalam beberapa contoh berikut. Maksudnya adalah bahwa tingkat pendidikan seharusnya mampu mengangkat derajat orang sehingga sesuatu perbuatan lebih bermartabat sesuai dengan ilmu yang sudah ditimbanya semasa sekolah.



- (32) SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun masih buang sampah sembarangan? *17 tahun sekolah ngapain aja?*
- (33) Bila kamu *berpendidikan*, jangan buang sampah di sini.

### c. Aneka Kesalahan Berbahasa

Data larangan membuang sampah dalam penelitian ini termasuk dalam ragam tulis karena larangan membuang sampah dituangkan dalam papan, poster, atau spanduk larangan yang ditempel di tempat tertentu. Oleh karena itu, sistem ejaan yang diterapkannya menggantikan aspek suprasegmental dalam tuturan lisan. Dengan demikian, pemakaian ejaan sangat penting dalam ragam bahasa yang digunakan di papan larangan membuang sampah.

Dalam papan larangan membuang sampah berbahasa Indonesia dijumpai penggunaan bahasa Indonesia yang sebagian bercampur atau beralih kode dengan bahasa lain, pada umumnya bahasa Inggris, dan ada juga bahasa daerah karena konteks latar belakang masyarakatnya. Namun, campur kode dan alih kode tidak digolongkan dalam kesalahan berbahasa karena keduanya merupakan realitas pemakaian bahasa dalam situasi tidak formal yang berkonteks masyarakat multilingual dan situasi kebahasaan yang diglosik.

Oleh karena itu, diidentifikasi kesalahan berbahasa dalam data tulisan ini didasarkan pada kesalahan ejaan, pemakaian kosakata baku dalam jenis papan larangan yang formal atau konvensional, pemilihan kata, serta struktur. Kesalahan-kesalahan tersebut membuat larangan menjadi tidak efektif karena ambiguitas atau ketidakjelasan maksud yang dikehendaki.

Berikut ini uraian aneka kesalahan berbahasa Indonesia dalam papan larangan membuang sampah.

### d. Kesalahan Ejaan

Ejaan dalam ragam tulis menggantikan unsur suprasegmental, seperti jeda dan intonasi yang dapat dijumpai dalam raham lisan. Ejaan dalam penulisan larangan membuang sampah terlihat dari lazimnya pemakaian tanda baca yang berlebihan, pemakaian spasi yang tidak perlu, penggunaan tanda baca yang tidak tepat, pemakaian huruf kecil dan kapital, serta penulisan kata.

Pada contoh berikut terdapat kesalahan pemakaian spasi sebelum tanda seru serta sebelum dan setelah garis miring. Selain itu, ada juga kesalahan berupa ketiadaan tanda baca untuk mengakhiri kalimat kedua dan ketiga yang seharusnya dapat diberi tanda titik.

- (34) Awas banjir !

Dilarang buang sampah di sungai / kali

Ingat ada saudara kita di daerah rawan banjir

Pemakaian tanda baca yang berlebihan dalam data, umumnya berupa pemakaian tanda seru dan tanda titik. Tanda seru yang berlebihan ini barangkali digunakan sebagai pengganti emosi penyanganan dalam tuturan lisan. Sementara itu, pemakaian tanda titik yang berlebih (yang dalam ejaan digunakan untuk menandai sesuatu yang belum selesai atau tidak dimulai dari awal) mungkin digunakan juga untuk maksud yang sama, yakni menyangatkan.

- (35) Monyet aja tau ...!!!

Sungai/kali bukan tempat sampah.



Kesalahan ejaan lain dijumpai pada penggunaan tanda baca yang tidak tepat, seperti dalam contoh berikut. Tanda tiga titik tidak diperlukan baik setelah kata *awas* atau setelah kata *looo*. Selain itu, pemakaian tanda tanya pada kalimat terakhir, *Sudah banyak kejadian lo* seharusnya menggunakan titik saja atau jika ingin memberikan penyangatan dapat menggunakan tanda seru.

(36) Jangan buang sampah di sini. Awas ...! Angker. Sudah banyak kejadian looo...?

Pada penulisan rupiah, kesalahan penggunaan tanda titik setelah rupiah (Rp) dan tanda hubung untuk menggunakan pecahan desimal tampak dalam contoh berikut. Kesalahan tersebut sering dijumpai pada penulisan nominal rupiah dalam praktik pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari.

(37) Dilarang membuang sampah *disembarang* tempat.  
Melanggar perda no 14 tahun 2007 tentang pengelolaan sampah  
Dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (*tiga*) bulan penjara atau  
denda paling banyak Rp. 50.0000.000,- ( lima puluh juta rupiah )  
Mari kita ciptakan lingkungan yang *bersih, indah dan nyaman*  
Dinas Kinpraswilhub Kab. Sleman 2008

Selain penulisan rupiah, dalam contoh di atas terdapat kesalahan ejaan yang lain, yaitu penulisan kata *disembarang* yang seharusnya menggunakan spasi. Tidak adanya tanda titik setelah *no*, tidak adanya tanda koma setelah kata *indah* dalam perincian *bersih, indah, dan nyaman*, serta adanya spasi setelah tanda kurung buka dan sebelum tanda kurung tutup.

Kesalahan tidak dipakainya spasi, seperti dalam *disembarang* lazim sekali dijumpai, seperti dalam contoh penulisan *disini* pada contoh berikut.

(38) Yang buang sampah *disini* jadi gila amin 3000.

(39) “Peringatan keras”. Berani buang sampah sembarangan nyawa taruhannya *di bacok* warga jangan salahkan kami. Warga Rt. 04/06.

Kesalahan seperti itu bahkan sering dijumpai dalam tulisan formal sekalipun. Hal ini disebabkan belum dipahaminya konsep penulisan kata depan dan afiks dalam bahasa Indonesia. Dalam PUEBI, imbuhan (awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran) ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, sedangkan kata depan *di* ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Pada contoh *disembarang* dan *disini*, *di* merupakan kata depan karena menunjukkan lokasi, yaitu tempat, bukan afiks pembentuk kata kerja pasif. Justru pada contoh di atas, imbuhan *di-* yang ada dalam kata kerja pasif *dibacok* malah ditulis terpisah, padahal seharusnya serangkai.

Sementara itu, pada contoh berikut didapati kesalahan penggunaan huruf kecil pada *ilahirrabbi* yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Ada pula kesalahan pemakaian koma setelah kata *biar* sebelum kata *tabrakan*. Kesalahan pemakaian tanda koma setelah kata *biar* dan sebelum kata *tabrakan* membuat kalimat menjadi tidak efektif. Tanda koma seharusnya tidak digunakan setelah kata bantu kata kerja atau sebelum kata kerja yang memiliki kata bantu.

Dalam PUEBI disebutkan bahwa seharusnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Kesalahan ini juga ada pada contoh pemakaian sehingga *ilahirrabbi* seharusnya huruf pertama ditulis menggunakan huruf kapital. Demikian pula dengan kata ganti kedua pada *menghadapmu* yang ada pada contoh



berikutnya, yang mengacu pada Tuhan. Kata ini seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital dan diberi tanda hubung menjadi *menghadap-Mu*.

- (40) Bismillahirrahmanirrahim  
Ya Allah Ya ilahirrabbi,..  
Yang buang sampah disini  
Ambil ajah nyawanya ya Allah,..  
Soalnya saya males ribut  
Keluar gang ini *biar, tabrakan trus mati*  
Amin ya robbal alamin  
Stop buang sampah sembarangan
- (41) “Ya Allah” mudah-mudahan engkau panggil menghadapmu  
ya...Allah..  
Bagi orang-orang yang membuang sampah di tempat ini...

Adapun kesalahan peletakan tanda koma terdapat pada contoh berikut. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakefektifan kalimat karena menyebabkan ambiguitas: bahwa yang menjadi taruhan adalah *nyawa*, bukan *sembarangan nyawa*. Pemakaian tanda koma pada contoh ini seharusnya ditulis setelah kata *sembarangan* karena dalam contoh ini klausa keterangan syarat terletak di awal kalimat, yakni *berani buang sampah sembarangan* yang menimbulkan klausa inti sebagai akibatnya, *nyawa taruhannya*.

- (42) Berani buang sampah, sembarangan nyawa taruhannya.

#### e. Kesalahan Pemakaian Kosakata Tidak Baku

Mengingat ragam bahasa yang ada dalam data penelitian bukan hanya ragam santai, melainkan juga ada ragam formal, dalam bagian ini diuraikan pemakaian kosakata tidak baku yang ada dalam papan larangan ragam formal. Pemakaian kosakata tidak baku dalam ragam santai tidak dibahas mengingat sifat ragam ini memang tidak harus menggunakan kosakata baku. Berikut ini contohnya.

- (43) *Himbauan*  
Mulai tanggal 5 November 2016 dilarang membuang sampah dilokasi ini.
- (44) Dilarang buang sampah disini  
Kami akan melakukan tindakan dan *sangsi* hukum  
Sesuai dengan Perda provinsi DKI Jakarta 3 tahun 2013

Pemakaian kata *himbauan* seharusnya *imbauan*, sedangkan kata *sangsi* seharusnya *sanksi*. Kesalahan penulisan *himbauan* terjadi karena masyarakat sudah terbiasa atau lazim menggunakan kata tersebut. Adapun kesalahan penggunaan kata *sangsi* alih-alih *sanksi* adalah karena relasi homofon dalam bahasa Indonesia. Jika dilihat konteksnya, yang dimaksud adalah *sanksi*, yakni ‘tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya)’ (<http://kbbi.kemdikbud.go.id>), bukan *sangsi* yang artinya adalah ‘bimbang; ragu-ragu’ (<http://kbbi.kemdikbud.go.id>).

#### f. Kesalahan Struktur

Salah satu kesalahan struktur yang dijumpai dalam data adalah kesalahan pemakaian imbuhan. Dalam contoh berikut, pemakaian akhiran *-kan* tidak tepat karena dalam kata *cabutkan*, *-kan* memiliki makna ‘melakukan sesuatu untuk orang



lain' yang menuntut kehadiran penerima, bukan objek langsung. Jika demikian, seharusnya kalimatnya menjadi *Ya Allah, cabutkan saya nyawa orang yang buang sampah di sini* atau jika tidak menggunakan *saya*, imbuhan *-kan* dapat dihilangkan dan bisa juga ditambah *-lah* sehingga kalimatnya menjadi *Ya Allah, cabut(lah) nyawa orang yang buang sampah di sini*.

(45) *Ya Allah cabutkan nyawa org yg buang sampah disini.*

#### **g. Ketidaklengkapan Struktur**

Pada kedua contoh berikut, terdapat kesalahan pemakaian bahasa Indonesia karena ketidaklengkapan struktur kalimat. Unsur objek yang seharusnya hadir dalam kedua contoh berikut tidak ada dan tidak pula digantikan oleh gambar ataupun simbol. Padahal, unsur objek yang seharusnya hadir adalah *sampah*. Oleh karena itu, kalimatnya menjadi tidak efektif karena terkesan belum selesai atau masih menggantung.

(46) Bila kamu berpendidikan jangan buang disini.

(47) Pantang pulang sebelum buang!

## **2. Papan Larangan Membuang Sampah sebagai Potret Budaya Masyarakat**

Papan larangan membuang sampah sembarangan merupakan reaksi atas budaya masyarakat dalam membuang sampah secara sembarangan. Masyarakat di sekitar lokasi atau area tempat orang sering membuang sampah sembarangan meresponsnya dengan membuat papan larangan. Papan tersebut mampu menjadi tempat untuk mengekspresikan identitas diri masyarakat melalui pilihan dan preferensi mereka untuk objek dan opini terhadap pembuangan sampah. Dalam hal ini masyarakat tertentu berusaha berbeda dari yang lain dengan menegaskan dan mencerminkan keunikan mereka sendiri.

Sebagai contoh, masyarakat dengan preferensi kultural yang berorientasi pada dimensi religiusitas cenderung menggunakan seruan tematik keagamaan, misalnya, pemakaian diksi *Allah, ilahirobi, taman surga*, dan sebagainya. Namun, di lain pihak, seruan tematik religius ini tidak jarang justru dipelintir dengan makna sarkastik berupa sumpah serapah. Potret lainnya, larangan membuang sampah diserukan secara sarkastik dengan mengasosiasikan perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan seperti perilaku hewan. Di sisi lain, identitas masyarakat juga tampak dari kreativitas pemakaian bahasa dan pemanfaatan topik dalam tujuan menggugah hati para pembacanya, misalnya, adalah dengan topik percintaan yang kemudian dibungkus dengan bahasa nonformal kemudian diparodikan.

Dari pemakaian bahasanya di ruang publik, seruan yang disampaikan itu tidak mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dalam UU tersebut seharusnya memperhatikan kaidah. Namun, berbagai pelanggaran terhadap kaidah bahasa Indonesia, baik sistem ejaan, pemilihan kata maupun struktur kalimat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mental yang tidak memedulikan kaidah tertib berbahasa. Dari pemakaian bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki preferensi kebahasaan yang berorientasi pada kehendak sosiokultural yang dominan.



## PENUTUP

Berdasarkan analisis yang sudah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam larangan membuang sampah dapat berupa ragam formal, konsultatif, dan santai yang disampaikan secara konvensional dan tidak konvensional. Dalam pemakaiannya terdapat berbagai kesalahan baik dari sisi ejaan, kebakuan kosakata, diksi, maupun struktur bahasa yang berdampak pada ketidakefektifan penyampaian idenya. Dari hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki preferensi kebahasaan yang berorientasi pada kehendak sosiokultural yang dominan serta berusaha berbeda dari yang lain dengan menegaskan dan mencerminkan keunikan mereka, yang sebagian di antaranya menunjukkan ketidakpedulian pada pemakaian bahasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Belk, R.W. (1988). Possessions and the extended self. *Journal of Consumer Research*, 15, 139—168.
- Breuer, J. dan Freud, S. (1957). *Studies on hysteria* (J. Strachey, Trans.). New York: Basic Books. (Original work published 1895).
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. (2010). *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Coupland, Nikolas. (2007). *Style: Language Variation and Identity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fasya, Mahmud dan Euis Niccky Marnianti Suhenda. (2013). Variabel Sosial sebagai Penentu Penggunaan Makian dalam Bahasa Indonesia. Dalam *Linguistik Indonesia*, Tahun ke-31, No. 1., 81—102.
- Han, S. dan Shavitt, S. (1994). Persuasion and culture: Advertising appeals in individualistic and collectivistic societies. *Journal of Experimental Social Psychology*, 30, 326—350.
- Holmes, Janet. (1995). *An Introduction to Sociolinguistics*. UK: Longman.
- Murni, Sri Minda. (2012). Piranti Bahasa dan Kesantunan. Dalam *Linguistik Indonesia*, tahun ke-30, No. 2, pp.183--200.
- Pastika, I Wayan. (2012). Kelemahan Fonologis Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Dalam *Linguistik Indonesia*, tahun ke-30, No. 2, pp.147--165.
- Susanti, Ratna. (2014). Analisis Kesalahan Berbahasa pada Penulisan Media Luar Ruang di Kota Klaten. Dalam *Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta*. Volume 1 nomor 1 Juni 2014.
- Ratner, R.K. dan Kahn, B.E. (2002). The Impact of Private versus Public Consumption on Variety-Seeking Behavior. *Journal of Consumer Research*, 29, 246-257.
- <https://news.detik.com/berita/d-3825854/setiap-hari-jakarta-hasilkan-7000-ton-sampah>. Diakses Senin, 28 Mei 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dalam jaringan. Diakses dari [badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id).
- UU RI No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Diakses dari [badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id).



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 1 Kelompok 3**

Pembicara : Wira Kurniawati

Judul makalah : “Larangan Membuang Sampah: Potret Budaya Masyarakat Melalui Pemakaian Bahasa Indonesia di Ruang Publik”

Hari, tanggal : Senin, 29 Oktober 2018

Pukul : 08.00—09.30

Moderator : Dr. Maryanto

Pencatat : Anita Astriawati Ningrum

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Larangan membuang sampah menggunakan bahasa Indonesia, tetapi banyak kesalahan.
2. Larangan membuang sampah jarang sekali menggunakan bahasa asing, tetapi penggunaan bahasa Indonesia juga mengandung banyak kesalahan yang menarik diamati.
3. Rumusan masalah: ragam bahasa, kesalahan yang sering muncul, dan budaya masyarakat yang tecermin.
4. Dilihat dari tingkat hierarki, dijumpai tiga jenis ragam bahasa pada data larangan membuang sampah, yaitu formal, konsultatif, dan kasual. Larangan membuang sampah secara formal disampaikan menggunakan bahasa Indonesia ragam formal, jenis konsultatif menggunakan ragam semiformal, sementara yang santai menggunakan ragam tidak resmi. Dilihat dari tingkat konvensionalitasnya, ada dua jenis konvensi bahasa dalam larangan-larangan membuang sampah yang ditemukan dalam data penelitian, yaitu ragam konvensional dan tidak konvensional.
5. Dalam papan larangan membuang sampah berbahasa Indonesia dijumpai penggunaan bahasa Indonesia yang sebagian bercampur atau beralih kode dengan bahasa lain, umumnya bahasa Inggris dan ada juga yang bahasa daerah karena konteks latar belakang masyarakatnya. Namun, campur kode dan alih kode tidak digolongkan dalam kesalahan berbahasa karena keduanya merupakan realitas pemakaian bahasa dalam situasi tidak formal yang berkonteks masyarakat multilingual dan situasi kebahasaan yang diglosik.
6. Kesalahan yang dijumpai dalam data tulisan ini meliputi kesalahan ejaan, pemakaian kosakata baku dalam jenis papan larangan yang formal atau konvensional, pemilihan kata, serta struktur. Kesalahan-kesalahan tersebut membuat larangan menjadi tidak efektif akibat ambiguitas atau ketidakjelasan maksud yang dikehendaki.
7. Papan larangan membuang sampah sembarangan merupakan reaksi atas budaya masyarakat dalam membuang sampah secara sembarangan. Masyarakat di sekitar lokasi atau area tempat orang sering membuang sampah sembarangan meresponsnya dengan membuat papan larangan. Papan tersebut mampu menjadi tempat untuk mengekspresikan identitas diri masyarakat melalui pilihan dan preferensi mereka untuk objek dan opini terhadap pembuangan



sampah. Dalam hal ini, masyarakat tertentu berusaha berbeda dari yang lain dengan menegaskan dan mencerminkan keunikan mereka sendiri.

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Laili Etika  
Instansi : Universitas Muhammadiyah, Surakarta

#### **Tanggapan:**

Penelitian ini seharusnya mengenai impresi, bukan mengenai kesalahan berbahasa.

#### **Penanya 2**

Nama : Ria Febrina  
Instansi : Universitas Andalas

#### **Pertanyaan:**

Bahasa adalah doa. Kondisi ini mengkhawatirkan. Menggambarkan bagaimana budaya masyarakat. Aturan untuk dilanggar, tidak untuk dipatuhi. Budaya adalah sesuatu yang baik. Yang buruk, bukan budaya.

#### **Jawaban:**

Penelitian ini tidak fokus pada kesalahan berbahasa masyarakat, tetapi lebih fokus pada instansi.

#### **Penanya 3**

Nama : Mahmudah  
Instansi : Universitas Negeri Makassar

#### **Pertanyaan:**

Bagaimana interpretasi dari larangan tersebut?

#### **Jawaban:**

Larangan membuang sampah dapat berupa imbauan, dapat juga berupa respons. Potret budaya masyarakat Indonesia adalah menambahkan doa dan ancaman yang menggambarkan betapa kalimat larangan yang umum sudah tidak berdampak pada masyarakat.

#### **Penanya 4**

Nama : Hadi Laksono  
Instansi: Kalimantan Tengah

#### **Tanggapan:**

Mengapa belakangan ini kejayaan bahasa Indonesia tergerus?

1. Pembiasaan bahasa Indonesia nonformal lebih banyak digunakan.
2. Belum ada kebanggaan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap tidak keren.





**Jawaban:**

Sepakat dengan asumsi pembiasaan dan ketidakbanggaan. Tidak dapat bersaing dalam lima lanskap tersebut.

**Penanya 5**

Nama : Alfian

Instansi : Universitas Hamzan Wali, Lombok

**Pertanyaan:**

Apakah betul larangan tersebut dapat dikaji secara pragmatik?

**Jawaban:**

Penggunaan bahasa dalam larangan: imbauan tentang kesadaran membuang sampah tidak ada, yang ada adalah larangan yang sarkastik atau larangan lucu-lucuan. Bagaimanapun, konten bahasa yang santun mencerminkan masyarakat.

**Isu-Isu Penting:**

1. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar berkaitan dengan aspek kompetensi pengguna, keterampilan pengguna bahasa. Oleh karena itu, pengetahuan pengguna bahasa Indonesia mengenai aturan berbahasa Indonesia yang baik dan benar perlu ditingkatkan.
2. Diperlukan regulasi turunan dari UU 24 Tahun 2009 dan diperlukan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran UU tersebut.
3. Pola pengawasan lima pihak: (1) Pemda yang memberi izin, (2) masyarakat (LSM termasuk Duta Bahasa dan MGMP), (3) Badan Bahasa, (4) Ombudsman RI, dan (5) Satpol PP.



## C. SUBTEMA 3: BAHASA, SASTRA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

### 1. Bahasa, Sastra, dan Teknologi Informasi

Judul : Bahasa, Sastra, dan Teknologi Informasi  
Pembicara : Gun Gun Iswadi  
Jabatan : Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa,  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 15.45—17.45  
Moderator : Dr. Maryanto

Saya ingin menyampaikan perkembangan teknologi dan informasi yang ada di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan bahasa dan sastra. Judulnya adalah “Bahasa, Sastra, dan Teknologi”.

Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 143,46 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia. Itu luar biasa. Sebanyak 54% orang Indonesia sudah berinteraksi dengan internet dan 87% dari penggunaannya itu adalah generasi milenial. Sekarang ini kita sudah memasuki era digital. Ke mana-mana kita membayar tol bisa memakai *e-money*, dan sebagainya. Tahun 2016 jumlah pengguna internet di Indonesia masih 132,7 juta jiwa dan tahun 2017 meningkat menjadi 143 juta. Artinya, dalam satu tahun di Indonesia terjadi peningkatan jumlah pengguna internet sebanyak 11 juta orang. Dalam satu bulan pada tahun itu terjadi penambahan jumlah pengguna internet Indonesia sebanyak 916 ribu, artinya terjadi peningkatan hampir satu juta pengguna per bulan.

Dari segi infrastruktur, internet tentu memerlukan sinyal. Kemenkominfo membangun infrastruktur yang disebut Palafaring. Alat tersebut berfungsi untuk mendorong akses digital, khususnya di daerah terluar dan tertinggal sehingga dapat memperoleh akses internet. Dari segi ekonomi, saya beberapa kali berdialog dengan beberapa anak muda atau mahasiswa. Mereka rata-rata mengeluarkan uang per bulan untuk membeli pulsa internet sebesar 50—100 ribu rupiah. Artinya, kebutuhan masyarakat akan informasi ini sungguh luar biasa. Kalau kita membeli pulsa untuk mengisi kuota internet tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan akses informasi. Sekarang ini kebutuhan pokok masyarakat bukan hanya tiga, yang kita kenal sebagai sandang, pangan, dan papan, melainkan juga kebutuhan informasi sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia di Indonesia. Jadi, kalau tiga bulan tidak ada pulsa, matilah kita. Dibandingkan dengan membeli baju, lebih baik kita membeli pulsa.

Saya kira perubahan-perubahan itu harus kita antisipasi, termasuk juga pengembangan bahasa dan sastra, khususnya pada obrolan daring (*chatting*). Ketika mengirimkan pesan singkat, kita banyak berinteraksi menggunakan bahasa. Tentu saja hal itu juga berkaitan dengan bahasa praktis yang sering digunakan oleh anak muda (bahasa alay). Sekitar 87% dari total 143 juta pengguna internet adalah generasi milenial yang berusia 13—30 tahun. Data tersebut penting bagi kita untuk mengembangkan penyelenggaraan arus informasi, terutama di kalangan generasi muda. Fasilitas yang cukup memadai yang dibangun oleh pemerintah pada gilirannya mendorong terjadinya transformasi di



era digital. Hal itu juga terjadi di dunia pendidikan, misalnya ujian nasional yang sekarang sudah berbasis komputer. Era digital kemudian tentu saja juga merambah bidang kebudayaan. Saat ini orang lebih tertarik berbelanja daring (*online*) karena dianggap lebih murah dan praktis.

Demikian luar biasa perkembangan di dunia digital. Ada informasi yang benar dan valid, tetapi banyak juga informasi yang tidak benar (*hoaks*). Persoalannya adalah bagaimana mengantisipasi semua itu, terutama yang berkaitan dengan generasi milenial tadi yang masih memerlukan bimbingan agar dapat memanfaatkan informasi dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, penting juga untuk mencari tahu bagaimana mendorong masyarakat supaya bisa melek media sehingga mereka mampu memilah dan memanfaatkan informasi dengan baik sehingga informasi itu dapat mendatangkan nilai tambah. Oleh karena itu, keluarga perlu mendorong anggotanya untuk melek media.

Literasi adalah kemampuan menggali dan memproduksi data-data yang terdapat dalam media. Untuk itu, perkembangan teknologi haruslah diikuti dengan pendidikan literasi yang baik sehingga perkembangan internet tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan mengumbar informasi-informasi yang berpotensi memecah-belah kesatuan.

Ada empat manfaat media sosial, yaitu sebagai sumber informasi, sarana komunikasi, dan sarana membangun relasi. Sekarang kita melihat media sosial kerap digunakan untuk mengumbar informasi-informasi yang bisa menyulut perpecahan di antara kita. Langkah pencegahan yang dapat kita lakukan adalah memberikan edukasi literasi digital, memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat luas, dan bekerja sama dengan pihak kepolisian siber untuk mengurangi kejahatan di dunia maya. Kalau di dunia nyata ada undang-undang hukum pidana, di dunia maya itu ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Itu juga menyangkut informasi yang terkait dengan berita bohong atau *hoaks*.

Bahasa Indonesia di bidang teknologi dan informasi memiliki bermacam-macam medium atau bentuk. Istilah yang berkaitan dengannya pun bermacam-macam, seperti gawai (*gadget*), pos-el (*email*), linimasa (*timeline*), dan pengikut (*followers*). Oleh karena itu, pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi harus kita lakukan semaksimal mungkin. Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mempunyai Museum Penerangan. Pada era digital seperti sekarang kian banyak kajian penggunaan teknologi, terutama untuk memperkuat jati diri bangsa.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Judul : Bahasa, Sastra, dan Teknologi Informasi  
Pembicara : Drs. Gun Gun Iswadi, M.Si.  
Jabatan : Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 15.45—17.45  
Moderator : Dr. Maryanto  
Pencatat : 1. Dewi Khairiyah  
2. Retno Indarwati

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Jumlah pengguna internet di Indonesia dewasa ini mencapai 54,68% dari total jumlah penduduk dan 87% di antaranya adalah generasi milenial. Terjadi peningkatan dalam satu tahun (2016—2017) sebanyak 11 juta orang atau hampir 1 juta/bulan. Itu menunjukkan bahwa dari segi infrastruktur berarti Indonesia sudah memadai (ada sinyal). Dari segi ekonomi, tingkat ekonomi cukup memadai karena pengguna internet mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli pulsa. Hal itu juga menunjukkan kebutuhan penduduk terhadap akses informasi makin meningkat. Layanan yang paling banyak diakses adalah *chatting*. Sebanyak 87% masyarakat Indonesia menggunakan media sosial. Oleh karena itu, terjadi transformasi informasi dunia digital, yaitu di sektor pendidikan, budaya, dan sosial. Transformasi di era digital misalnya, Ujian Nasional dahulu menggunakan pensil dan kertas sekarang menggunakan komputer, dahulu orang mengenal kopi darat, saat ini bertemu dalam grup di media sosial.
2. Melek digital diperlukan oleh generasi muda agar mereka dapat berpikir kritis terhadap konten-konten digital.
3. Manfaat media sosial, di antaranya, ialah sebagai sarana komunikasi, sumber informasi, sarana peluang usaha, serta sarana membangun relasi dan komunitas. Hal itu harus didukung dengan strategi penggunaan media sosial yang bijak, edukasi literasi digital, pendampingan berkelanjutan oleh komunitas, dan pelibatan penegakan hukum.
4. Saat ini banyak sekali beredar bahasa alay dalam media sosial. Kosakata yang digunakan biasanya seperti *julid*, *kuy*, *japri*, *btw*, dan *tsadeest*. Tugas kita bersama adalah menertibkan berbagai kosakata dalam media sosial tersebut.
5. Peran teknologi informasi untuk bahasa dan sastra dapat digunakan semaksimal mungkin untuk membangun bahasa dan sastra, pengajaran maya, pembelajaran elektronik, korpus data, dan dokumentasi bahasa.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Mahmudah

Instansi : Universitas Muhammadiyah, Makassar



**Pertanyaan:**

Bagaimana mengubah istilah-istilah (kosakata) di media sosial sementara kita tidak menguasai teknologi?

**Jawaban:**

Perkembangan teknologi tidak dapat dibendung, tetapi beberapa istilah dari bahasa asing yang sudah dipadankan dalam bahasa Indonesia perlu disosialisasikan. Para ahli bahasa dan masyarakat perlu duduk bersama untuk membahasisu-isu kebahasaan, terutama untuk generasi milenial.

**Isu-Isu Penting:**

Ahli bahasa dan masyarakat, terutama generasi milenial, perlu duduk bersama untuk memasyarakatkan padanan-padanan istilah di media sosial.



## 2. Pengembangan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TBBI) Daring Terpadu

### PENGEMBANGAN TATA BAHASA BAKU BAHASA INDONESIA (TBBI) DARING TERPADU

*Development of An Integrated Online Standard Grammar of Indonesian*

**David Moeljadi**

Universitas Teknologi Nanyang, Singapura  
davidmoeljadi@gmail.com

#### **Abstrak**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ialah instansi pemerintah yang ditugasi untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Salah satu tugas Badan Bahasa ialah menerbitkan berbagai produk kebahasaan. Dua produk yang sering dimanfaatkan para pemelajar bahasa Indonesia adalah *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (TBBI). KBBI terbaru edisi kelima (Amalia, 2016) diluncurkan pada tahun 2016 dalam tiga versi: cetak, daring, dan luring (Moeljadi *et al.*, 2017). Sejak diluncurkan pada 28 Oktober 2016, KBBI Daring mendapat sambutan hangat masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. KBBI Daring memudahkan pemelajar bahasa Indonesia dan masyarakat umum menggunakan kamus pada era digital ini. Hal yang serupa dapat dilakukan pada TBBI. Dalam makalah ini dibahas tahap awal pengembangan pangkalan data dan laman TBBI Daring Terpadu dengan menggunakan tata bahasa komputasional bahasa Indonesia INDRA (*Indonesian Resource Grammar*) (Moeljadi *et al.*, 2015) yang dikembangkan dengan metode rekayasa tata bahasa dengan mengacu pada buku-buku referensi *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Alwi *et al.*, 2014) dan *Indonesian Reference Grammar* (Sneddon *et al.*, 2010). TBBI Daring Terpadu akan memuat aturan-aturan tata bahasa bahasa Indonesia baku yang dipadukan dengan leksikon dan contoh-contoh dari korpus bahasa Indonesia baku yang telah dianotasi secara sintaksis dan semantis. Penulis berharap, TBBI Daring Terpadu dapat menjadi acuan utama tata bahasa baku bahasa Indonesia yang dapat diakses dengan mudah oleh para penggunanya, misalnya pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA); dapat memperkaya KBBI Daring dalam penggolongan kelas kata yang lebih spesifik; serta dapat mendorong kemajuan bidang linguistik komputasional dan pemrosesan bahasa alami bahasa Indonesia, misalnya dalam penerjemahan mesin dan pengembangan sistem pemeriksaan gramatika dan leksikon bahasa Indonesia baku.

**Kata-kata kunci:** TBBI, tata bahasa, bahasa Indonesia, pangkalan data, daring

#### **Abstract**

*The Agency of Language Development and Cultivation or Badan Bahasa is an agency under the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia that has assigned to deal with matters related to Indonesian language and literature. One of its job is to publish language-related products. Two products which are often used by Indonesian language learners are Indonesian dictionary*



called *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* and reference grammar called *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TBBi)*. The latest, fifth edition of *KBBI* (Amalia, 2016) was launched in 2016 in three versions: online, printed, and mobile applications (Moeljadi et al. 2017). Since its launch on October 28, 2016, the online *KBBI* has helped Indonesian learners and others in this digital era. A similar thing can be done for *TBBi*. This paper discusses the initial stage of the development of an online integrated *TBBi* page and database. It employs an Indonesian computational grammar called the *Indonesian Resource Grammar (INDRA)* (Moeljadi et al., 2015) which has been developed using grammar engineering method, referring to the existing reference grammars of Indonesian, especially *TBBi* (Alwi et al., 2014) and the *Indonesian Reference Grammar* (Sneddon et al. 2010). The online integrated *TBBi* will contain linguistic documentation of phenomena, integrated with lexicon and examples from a standard, syntactically-and-semantically-annotated Indonesian corpus. I hope the online integrated *TBBi* can become the main reference for standard Indonesian grammar which can be easily accessed by its users, e.g. Indonesian for Foreign Speakers (BIPA) learners, can enrich the online *KBBI* in a refined part-of-speech subcategorization, and can promote the advance of Indonesian computational linguistics and natural language processing fields, e.g. in the development of a tool for grammar and lexicon check for standard Indonesian and machine translation.

**Keywords:** *TBBi, grammar, Indonesian, database, online*

## PENDAHULUAN

Pendaftaran produk kebahasaan dan kesastraan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) telah dimulai dari *KBBI Daring*. *KBBI Daring*<sup>1</sup> adalah produk Badan Bahasa yang paling banyak digunakan saat ini. Alexa<sup>2</sup> mencatat bahwa *KBBI Daring* menduduki peringkat ke-45 situs *web* yang paling banyak diakses di Indonesia dan peringkat pertama untuk situs pemerintah yang diakhiri dengan nama domain “go.id”. Hal itu menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan produk kebahasaan, terutama kamus. Selain *KBBI Daring*, Badan Bahasa juga telah meluncurkan *Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia*,<sup>3</sup> *Glosarium*,<sup>4</sup> dan *Ensiklopedia Sastra Indonesia*.<sup>5</sup> Produk Badan Bahasa lainnya yang belum didaftarkan, tetapi sering digunakan para pemelajar bahasa Indonesia dan berpotensi didaftarkan adalah *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (*TBBi*). Dengan adanya *TBBi Daring*, tata bahasa baku bahasa Indonesia dapat didokumentasikan secara digital. Selain itu, karena tata bahasa tidak dapat dipisahkan dari leksikon dan penggunaannya di masyarakat (korpus), *TBBi Daring* memadukan atau mengintegrasikan tata bahasa, leksikon, dan korpus.

Pendaftaran atau dokumentasi tata bahasa secara daring memerlukan tata bahasa komputasional (*computational grammar*), yaitu kumpulan aturan tata

---

<sup>1</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>2</sup><https://www.alexa.com/topsites/countries/ID>, diakses pada 29 Agustus 2018

<sup>3</sup><http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/>

<sup>4</sup><http://118.98.223.79/glosarium/>

<sup>5</sup><http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/>



bahasa dan leksikon yang telah dirumuskan secara detail dan eksplisit dan “diterjemahkan” ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer sehingga dapat diproses secara otomatis dengan menggunakan metode rekayasa tata bahasa (*grammar engineering*). Tata bahasa komputasional bahasa Indonesia berlisensi sumber terbuka yang berpotensi digunakan dalam pengembangan TBBI Daring Terpadu adalah *Indonesian Resource Grammar* (INDRA) (Moeljadi *et al.*, 2015). INDRA dikembangkan di dalam kerangka teori sintaks Tata Bahasa Struktur Frasa Berbasis Induk atau *Head-driven Phrase Structure Grammar* (HPSG) (Pollard dan Sag, 1994; Sag *et al.*, 2003) dan model semantik bernama Semantik Rekursi Minimal atau *Minimal Recursion Semantics* (MRS) (Copestake *et al.*, 2005), dengan menggunakan alat-alat komputasional atau perkakas (*tools*) yang dikembangkan oleh kelompok peneliti *DEep Linguistic Processing with HPSG-Initiative* (DELPH-IN). INDRA telah digunakan dalam aplikasi *treebank* berlisensi sumber terbuka, bernama JATI (Moeljadi, 2017) dan berpotensi digunakan dalam aplikasi lainnya, seperti penerjemahan bahasa Indonesia-Inggris dengan mesin, pembelajaran bahasa Indonesia dengan bantuan komputer, pengecekan tata bahasa secara otomatis, dan tentu saja pendokumentasian bahasa Indonesia secara daring.

Dalam makalah ini dibahas aspek-aspek pengembangan pangkalan data dan laman TBBI Daring tahap awal. Untuk pengembangan tahap lanjut, TBBI Daring dapat dipadukan dengan leksikon (KBBI Daring) dan korpus (Korpus Indonesia) (Kwary, 2018) menggunakan INDRA.

### **Rekayasa Tata Bahasa**

Praktik umum yang biasanya dilakukan di bidang dokumentasi bahasa atau tata bahasa deskriptif meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Bidang rekayasa tata bahasa (*grammar engineering*) mirip dengan dokumentasi tata bahasa karena bidang ini mencoba mendeskripsikan bahasa sebagaimana digunakan oleh penutur jati, tetapi berfokus pada sintaksis dan semantik. Selain itu, rekayasa tata bahasa memanfaatkan komputer dalam pengecekan konsistensi analisis dan pemodelan tata bahasa dan pengujiannya terhadap berbagai contoh yang ada di korpus secara luas (Bender dan Fokkens, 2010). Sag *et al.* (2003) menulis bahwa sintaksis berperan penting dalam pemrosesan bahasa manusia karena sintaksis mengatur batasan-batasan bagaimana kalimat-kalimat dapat atau tidak dapat dibentuk dan menentukan satu set aturan-aturan yang memprediksi keberterimaan kalimat-kalimat dalam suatu bahasa. Beberapa tujuan rekayasa tata bahasa adalah sebagai berikut.

- a) untuk menentukan apakah sembarang kalimat gramatikal/berterima atau tidak dan untuk memberikan berbagai kemungkinan interpretasi sintaksis dan representasi semantik;
- b) untuk meninjau bagaimana tata bahasa suatu bahasa berbeda dengan tata bahasa lainnya; dan
- c) untuk mengetahui kemampuan berbahasa manusia secara umum.

Flickinger *et al.* (2010) menyebutkan komponen-komponen penting dalam rekayasa tata bahasa sebagai berikut.

- a) Teori linguistik yang solid ialah teori yang memiliki fondasi matematis yang kukuh dan model yang mudah diimplementasikan secara komputasional, serta





- bersifat universal (berlaku untuk bahasa-bahasa yang berbeda). Teori tersebut akan dijabarkan dalam bab Landasan Teori.
- Platform rekayasa tata bahasa yang digunakan untuk mengimplementasikan deskripsi bahasa secara formal harus memiliki editor tata bahasa, prosesor yang memiliki sistem pengurai kalimat dan pembentuk kalimat, sistem antarmuka pengguna, dan perangkat aplikasi *treebank*.
  - Sumber-sumber linguistik, seperti korpus, *treebank*, dan buku-buku referensi tata bahasa, termasuk tata bahasa komputasional.
  - Metode penelitian yang akan dijelaskan dalam bab Metode Penelitian.

## LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pengantar tentang kerangka teori HPSG (Pollard dan Sag 1994; Sag *et al.* 2003) dan MRS (Copestake *et al.* 2005) yang digunakan dalam pengembangan INDRA.

### 1. Tata Bahasa Struktur Frasa Berbasis Induk

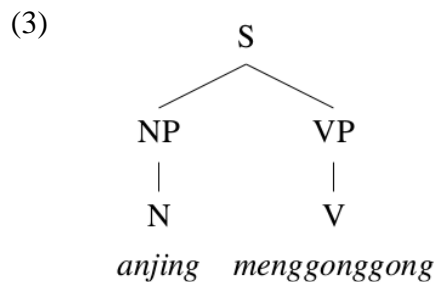
Kebanyakan model formal sintaksis bahasa alami adalah Tata Bahasa Bebas Konteks atau *Context-Free Grammars* (CFG), juga disebut Tata Bahasa Struktur Frasa atau *Phrase-Structure Grammars*. Kerangka tata bahasa tersebut didasarkan pada struktur konstituen yang dirumuskan oleh Chomsky (1956). CFG terdiri atas sebuah set aturan-aturan tata bahasa dan leksikon simbol-simbol (kelas kata) dan kata-kata, seperti ditunjukkan pada (1). Set aturan-aturan tata bahasa ini mengelompokkan dan mengurutkan simbol-simbol, sedangkan leksikon menggabungkan simbol-simbol dengan kata-kata.

- Contoh set aturan-aturan tata bahasa:  
 $S \rightarrow NP VP$   
 $NP \rightarrow N$   
 $VP \rightarrow V$
- Contoh leksikon simbol (kelas kata) dan kata:  
N: anjing  
V: menggonggong

Dari set aturan-aturan dan leksikon yang ditunjukkan pada (1) di atas, sebuah kalimat dapat dibentuk, seperti yang ditunjukkan pada (2).

(2) *Anjing menggonggong.*

Kalimat bentukan tersebut juga dapat disajikan dalam diagram pohon, seperti yang digambarkan pada (3).





Tata Bahasa Struktur Frasa Berbasis Induk atau *Head-driven Phrase Structure Grammar* (HPSG) berorientasi pada teks yang ada di permukaan dan tidak mengasumsikan adanya struktur abstrak. Karena itu, HPSG menyajikan struktur yang cukup sederhana yang berhubungan langsung dengan untaian kata-kata yang membentuk kalimat. HPSG bersifat monostratal, yaitu unsur ortografis, sintaktis, semantis, dan pragmatis berada dalam sebuah struktur tunggal atau sebuah tanda. Tanda, yang merupakan pasangan bentuk dan makna, adalah satuan dasar atau primer dalam HPSG yang dimodelkan melalui Struktur Fitur Bertipe atau *Typed Feature Structures* (TFS). Tanda dalam HPSG meliputi kata, frasa, kalimat, dan ujaran. HPSG bersifat leksikalis, yaitu sebagian besar properti sintaksis dan semantik didefinisikan di dalam leksikon. Karena itu, informasi yang terdapat dalam struktur fitur sebuah tanda meliputi sintaksis dan semantik. Informasi tentang HPSG selanjutnya dapat dilihat di Pollard dan Sag (1994) dan Sag *et al.* (2003).

## 2. Semantik Rekursi Minimal

Semantik Rekursi Minimal atau *Minimal Recursion Semantics* (MRS) adalah model representasi semantik yang datar dan nonrekursif yang sesuai dengan struktur bertipe yang digunakan HPSG untuk memecahkan struktur sintaksis dan membentuk kalimat. MRS bukan teori semantik, melainkan sistem representasi semantik. Representasi MRS didesain untuk mengatasi masalah-masalah dalam pendekatan transfer semantik untuk mesin penerjemahan, khususnya untuk membuat model ambiguitas yang sering ada pada kalimat dengan kuantifikasi, misalnya *setiap anjing mengejar kucing putih*,<sup>6</sup> dengan menggunakan prinsip hubungan lingkup semantik yang kurang spesifik. MRS dapat dikonversi ke dalam sistem yang lebih dikenal, seperti kalkulus predikat (Copestake, 2002).

Tujuan utama representasi MRS adalah menemukan leksem-leksem yang tepat dan hubungan-hubungan di antara leksem-leksem tersebut yang dilisensikan oleh sintaksis. Inti representasi MRS adalah kumpulan predikat dasar atau *elementary predications* (EP). EP menunjukkan hubungan-hubungan dengan argumen-argumen terkait, misalnya makna kata 'anjing' dapat direpresentasikan dalam logika predikat, sebagaimana ditunjukkan pada (4a). Demikian pula 'menggonggong' dan 'anjing menggonggong' dapat direpresentasikan sebagai berikut.

- (4) a.  $\text{anjing}(x)$
- b.  $\text{menggonggong}(x)$
- c.  $\text{menggonggong}(x), \text{anjing}(x)$

Struktur (4c) adalah senarai (*list*) EP yang digabungkan. Urutan anggota-anggota yang ada di senarai tersebut bersifat arbitrer. Dalam HPSG, EP direpresentasikan sebagai struktur fitur bertipe atau *Typed Feature Structure* (TFS). Dalam TFS, pengodean semantik dilakukan bersamaan dengan sintaksis.

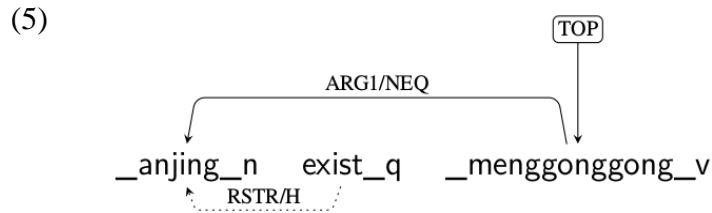
Representasi MRS untuk kalimat *anjing menggonggong* dapat diilustrasikan dengan grafik dependensi (*dependency graph*) yang disebut Semantik Rekursi Minimal Dependensi atau *Dependency Minimal Recursion Semantics* (DMRS),

---

<sup>6</sup>Kalimat ambigu ini dapat berarti: (1) setiap anjing mengejar satu kucing putih yang berbeda, atau (2) setiap anjing mengejar satu kucing putih yang sama.



seperti yang digambarkan pada (5). Struktur DMRS bersifat minimal dan predikat-predikat yang ada ditunjukkan dengan tautan-tautan sederhana dan tanpa variabel.

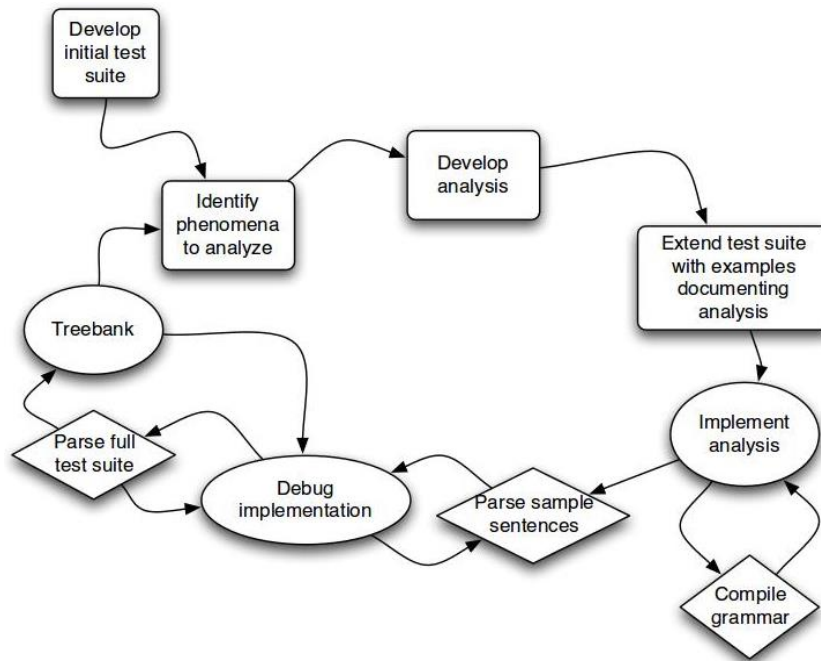


Hal paling penting yang perlu diperhatikan di sini adalah predikat utamanya (TOP) yang terletak pada kata kerja *menggonggong* yang memiliki argumen pertama (ARG1) dan satu-satunya, yaitu *anjing*. Informasi tentang MRS selebihnya dapat dibaca di Copestake *et al.* (2005).

### METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian dalam rekayasa tata bahasa. Pada umumnya, metode penelitian yang digunakan adalah perpaduan antara analisis linguistik dan implementasi komputasional. Saat kita mengembangkan tata bahasa komputasional, setiap detail fenomena kebahasaan yang mungkin tidak terpikirkan saat kita mendokumentasikan atau menganalisis bahasa harus kita pertimbangkan.

Metode penelitian rekayasa tata bahasa didorong oleh data di korpus (*corpus-driven*). Pertama-tama, contoh teks kalimat-kalimat gramatikal (dan juga takgramatikal) dipilih dan diformat dalam bentuk teks yang telah ditokenisasi dan dianotasi dengan glos interlinear ke dalam satu atau beberapa berkas contoh yang disebut *test-suite*. *Test-suite* dapat dibagi menjadi dua tipe: *test-suite* berdasarkan fenomena tata bahasa yang berisi fenomena-fenomena tertentu dan *test-suite* alami yang diambil dari korpus atau teks yang dikutip langsung dari sumbernya. Setelah itu, fenomena kebahasaan tertentu yang akan dianalisis diidentifikasi, misalnya konstruksi kopula, kalimat pasif, atau kata penggolong. Setelah suatu fenomena kebahasaan berdasarkan buku-buku referensi tata bahasa dan kepustakaan linguistik lain dianalisis, dibuat analisis menurut model HPSG dan diimplementasikan secara manual dengan menambahkan atau mengedit berkas kode komputasional.



**Gambar 1**  
**Proses Pengembangan Tata Bahasa Komputasional**  
Sumber: Bender *et al.* (2011: 10)

Implementasi fenomena yang mirip dalam tata bahasa komputasional bahasa-bahasa lain adalah *English Resource Grammar* (ERG) (Flickinger, 2000) untuk bahasa Inggris, *Jacy: an Implemented Grammar for Japanese* (Siegel *et al.*, 2016) untuk bahasa Jepang, dan *Zhong* (Fan *et al.*, 2015) untuk bahasa Mandarin yang dapat dijadikan rujukan. Setelah itu, tata bahasa komputasional tersebut dikompilasi dan dites dengan menguraikan kalimat-kalimat contoh atau *test-suite*, baik yang telah ada sebelumnya maupun yang baru dibuat. Biasanya, dengan tata bahasa komputasional tersebut tidak dapat diuraikan beberapa kalimat contoh, tidak dapat dihasilkan representasi semantik (MRS) yang tepat, atau tidak diperoleh cakupan sempurna dari *test-suite*. Oleh karena itu, pengembang tata bahasa komputasional harus menyelidiki kalimat-kalimat bermasalah yang tidak dapat diuraikan dengan baik dengan MRS yang tepat atau kalimat-kalimat yang memiliki jumlah hasil penguraian yang tinggi (jauh lebih tinggi daripada semua kemungkinan ambiguitas yang diprediksi). Jika masalahnya telah ditemukan, pengembang akan mengawakutu (*debug*) tata bahasa komputasional tersebut hingga semua fenomena yang ada, baik yang baru maupun yang lama, dapat tercakup dengan benar. Kadang-kadang proses pengawakutan tersebut memerlukan waktu lama karena analisis baru harus dipikirkan, dibuat modelnya dalam HPSG, dan diimplementasikan setelahnya. Kemudian, kalimat-kalimat contoh atau *test-suite* diuraikan kembali dan dibuat *treebank*-nya dengan menggunakan tata bahasa komputasional yang baru, lalu profil yang baru akan dibuat. Profil yang baru dapat dibandingkan dengan yang sebelumnya dari segi cakupan (*coverage*) dan efisiensi. Proses ini berjalan berulang-ulang, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Jika masalah yang ada telah dapat diatasi atau proses



pengawakutuan telah diselesaikan dengan baik, tata bahasa komputasional yang baru tersebut akan diunggah ke GitHub.<sup>7</sup>

### 1. Tata Bahasa Komputasional Bahasa Indonesia (INDRA)

*Indonesian Resource Grammar* (INDRA) (Moeljadi *et al.*, 2015) adalah tata bahasa komputasional bahasa Indonesia baku<sup>8</sup> pertama yang dikembangkan di dalam kerangka teori HPSG dan MRS dengan pendekatan analisis korpus yang memiliki cakupan fenomena kebahasaan yang luas yang terdapat dalam korpus, dengan menggunakan perkakas yang dibuat oleh DELPH-IN. INDRA berlisensi sumber terbuka dan dapat diunduh di GitHub.<sup>9</sup> INDRA dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian yang disebutkan di sebelumnya. Sejauh ini, INDRA telah digunakan dalam pengembangan aplikasi Treebank berlisensi sumber terbuka, bernama JATI (Moeljadi, 2017) yang berisi 2.003 frasa nominal. INDRA berpotensi digunakan dalam pengembangan Treebank Korpus Indonesia (Kwary, 2018). Penelitian sebelumnya mengenai tata bahasa komputasional bahasa Indonesia sebagian besar dikerjakan dalam kerangka teori Tata Bahasa Leksikal-Fungsional atau *Lexical-Functional Grammar* (LFG) (Kaplan dan Bresnan, 1982; Dalrymple, 2001). Tata bahasa komputasional bahasa Indonesia bernama IndoGram (Arka, 2012) dikembangkan dalam kerangka *Parallel Grammar* (ParGram) berdasarkan LFG dengan menggunakan pengurai (*parser*) *Xerox Linguistic Environment* (XLE).

Sejauh ini, INDRA dapat menguraikan dan menghasilkan frasa nominal kompleks dengan klitik, pronomina penunjuk, numeralia, kata penggolong, dan klausa yang dimulai dengan *yang*; frasa verbal dengan kata kerja bantu dan penanda diatesis aktif dan pasif yang berupa imbuhan *meN-* dan *di-*; konstruksi kopula; kata majemuk; klausa koordinatif dengan kata dan frasa berkelas kata sama; dan klausa subordinatif. Karena INDRA masih dalam tahap pengembangan, saat ini INDRA masih belum dapat menguraikan frasa adjektival ekuatif, komparatif, dan superlatif; klausa koordinatif dengan kata dan frasa berkelas kata berbeda; kalimat seru; dan kalimat tanya dengan kata tanya. Walaupun INDRA masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, dibandingkan dengan IndoGram, INDRA memiliki ketepatan yang lebih baik dalam analisis beberapa fenomena kebahasaan dan memiliki Treebank berlisensi sumber terbuka dengan ukuran lima belas kali lebih besar. Selain itu, INDRA berpotensi digunakan dalam berbagai aplikasi, misalnya penerjemahan multibahasa dengan mesin dan pembelajaran bahasa dengan bantuan komputer. Karena INDRA dikembangkan dalam komunitas DELPH-IN bersama dengan tata bahasa komputasional bahasa-bahasa lain, seperti ERG yang menggunakan representasi semantik yang sama, yaitu MRS, sistem penerjemahan mesin berbasis transfer semantik dapat dibuat dengan mudah.

---

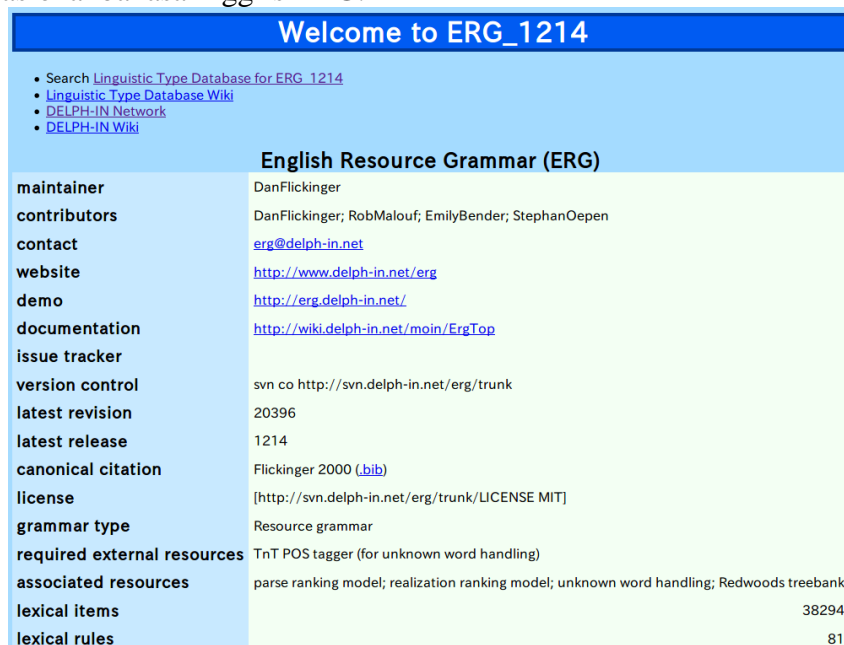
<sup>7</sup> GitHub adalah layanan penginangan web bersama untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem pengontrol versi Git dan layanan hosting internet.

<sup>8</sup> Hingga makalah ini ditulis (5 September 2018), INDRA hanya berisi leksikon dan aturan-aturan tata bahasa untuk bahasa Indonesia baku. Di kemudian hari, INDRA akan dikembangkan menjadi tata bahasa komputasional bahasa Indonesia, baik yang baku maupun yang takbaku.

<sup>9</sup> <https://github.com/davidmoeljadi/INDRA>

## 2. Pangkalan Data Tipe Linguistik

Setelah tata bahasa komputasional yang dikembangkan mencakup banyak fenomena kebahasaan dan memiliki *treebank*, Pangkalan Data Tipe Linguistik atau *The Linguistic Type Database* (LTDB) (Hashimoto *et al.*, 2007) dapat mulai dikembangkan. LTDB adalah pangkalan data terstruktur yang berisi dokumentasi tipe-tipe leksikal (penggolongan kelas kata yang terperinci) dan aturan-aturan tata bahasa yang ada di tata bahasa komputasional beserta dengan contoh-contoh dan informasi frekuensi penggunaan tipe-tipe leksikal dan aturan-aturan tersebut, yang diperoleh dari *treebank*. LTDB terdiri dari sistem manajemen pangkalan data dan antarmuka pengguna. LTDB dibuat dan dikembangkan secara semiotomatis. Kode program LTDB berlisensi sumber terbuka dan dapat diunduh di GitHub.<sup>10</sup> Dokumentasi LTDB ada di laman DELPH-IN.<sup>11</sup> Saat ini, LTDB telah diaplikasikan ke tata bahasa komputasional bahasa Inggris<sup>12</sup> dan bahasa Jepang.<sup>13</sup> Gambar 2 adalah tangkapan layar laman beranda LTDB untuk tata bahasa komputasional bahasa Inggris ERG.



Welcome to ERG_1214	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Search <a href="#">Linguistic Type Database for ERG_1214</a></li> <li>• <a href="#">Linguistic Type Database Wiki</a></li> <li>• <a href="#">DELPH-IN Network</a></li> <li>• <a href="#">DELPH-IN Wiki</a></li> </ul>	
<b>English Resource Grammar (ERG)</b>	
<b>maintainer</b>	DanFlickinger
<b>contributors</b>	DanFlickinger; RobMalouf; EmilyBender; StephanOepen
<b>contact</b>	<a href="mailto:erg@delph-in.net">erg@delph-in.net</a>
<b>website</b>	<a href="http://www.delph-in.net/erg">http://www.delph-in.net/erg</a>
<b>demo</b>	<a href="http://erg.delph-in.net/">http://erg.delph-in.net/</a>
<b>documentation</b>	<a href="http://wiki.delph-in.net/moin/ERGTop">http://wiki.delph-in.net/moin/ERGTop</a>
<b>issue tracker</b>	
<b>version control</b>	svn co <a href="http://svn.delph-in.net/erg/trunk">http://svn.delph-in.net/erg/trunk</a>
<b>latest revision</b>	20396
<b>latest release</b>	1214
<b>canonical citation</b>	Flickinger 2000 ( <a href="#">bib</a> )
<b>license</b>	[ <a href="http://svn.delph-in.net/erg/trunk/LICENSE">http://svn.delph-in.net/erg/trunk/LICENSE</a> MIT]
<b>grammar type</b>	Resource grammar
<b>required external resources</b>	TnT POS tagger (for unknown word handling)
<b>associated resources</b>	parse ranking model; realization ranking model; unknown word handling; Redwoods treebank
<b>lexical items</b>	38294
<b>lexical rules</b>	81

**Gambar 2**

### Tangkapan Layar Beranda LTDB untuk ERG

Beranda tersebut berisi metadata ERG, seperti nama pengembang, kontributor, alamat laman, tanggal revisi terakhir, lisensi, serta jumlah aturan-aturan leksikal dan gramatikal. Jika ingin mencari informasi terperinci yang ada di pangkalan data, pengguna dapat memilih tautan pencarian yang ada di bagian kiri atas laman beranda. Setelah itu, pengguna akan dibawa ke laman yang terdapat pilihan Beranda (*Home*), Tipe Leksikal (*Lex Types*), dan Aturan (*Rules*) pada kiri atas. Jika Tipe Leksikal diklik, laman berisi daftar semua tipe leksikal yang ada

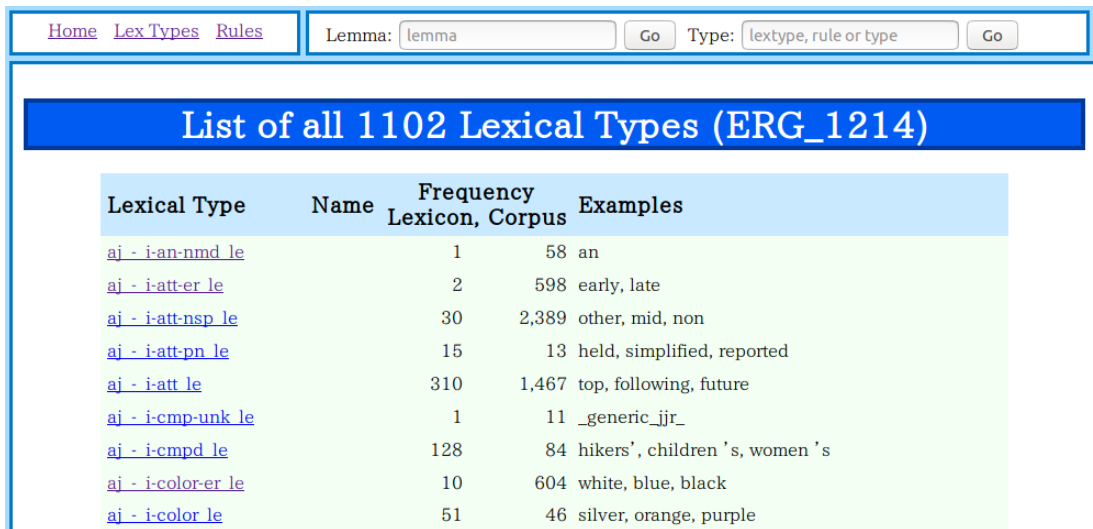
<sup>10</sup><https://github.com/fcbond/ltdb>

<sup>11</sup><http://moin.delph-in.net/LkbLtdb>

<sup>12</sup>[http://compling.hss.ntu.edu.sg/ltdb/ERG\\_1214//index.html](http://compling.hss.ntu.edu.sg/ltdb/ERG_1214//index.html)

<sup>13</sup>[http://compling.hss.ntu.edu.sg/ltdb/Jacy\\_1301/](http://compling.hss.ntu.edu.sg/ltdb/Jacy_1301/)

akan dimunculkan (lihat Gambar 3). Tipe leksikal adalah penggolongan kelas kata yang terperinci, dapat juga disebut sebagai subkategorisasi kelas kata.



Lexical Type	Name	Frequency Lexicon, Corpus	Examples
<a href="#">aj - i-an-nmd_le</a>		1 58	an
<a href="#">aj - i-att-er_le</a>		2 598	early, late
<a href="#">aj - i-att-nsp_le</a>		30 2,389	other, mid, non
<a href="#">aj - i-att-pn_le</a>		15 13	held, simplified, reported
<a href="#">aj - i-att_le</a>		310 1,467	top, following, future
<a href="#">aj - i-cmp-unk_le</a>		1 11	_generic_jjr_
<a href="#">aj - i-cmpd_le</a>		128 84	hikers', children 's, women 's
<a href="#">aj - i-color-er_le</a>		10 604	white, blue, black
<a href="#">aj - i-color_le</a>		51 46	silver, orange, purple

**Gambar 3**  
**Tangkapan Layar Laman Daftar Tipe Leksikal di ERG**

Gambar 3 menunjukkan bahwa dalam tata bahasa komputasional bahasa Inggris ERG, adjektiva warna seperti putih (*white*), biru (*blue*), dan hitam (*black*) digolongkan dalam satu kategori bernama *aj\_-\_i-color-er\_le* dengan jumlah total 10 kata dan frekuensi 604 (muncul 604 kali di korpus). Sementara itu, perak (*silver*), jingga (*orange*), dan ungu (*purple*) digolongkan dalam kategori yang berbeda bernama *aj\_-\_i-color\_le* dengan jumlah total 51 kata dan frekuensi 46 (muncul 46 kali di korpus). Penggolongan tersebut didasarkan pada aturan bahwa dalam bahasa Inggris, adjektiva seperti putih (*white*), biru (*blue*), dan hitam (*black*) mendapat akhiran *-er* dalam bentuk komparatif.

Hal itu dapat diketahui dari laman dokumentasi (lihat Gambar 4) yang berisi dokumentasi linguistik, contoh leksikal beserta lema (bentuk dasar) dan bentuk permukaannya (bentuk yang muncul di korpus) serta frekuensi (jumlah kemunculan di korpus) setiap lema, contoh-contoh yang diambil dari korpus, dan informasi tipe (implementasi yang terdapat di tata bahasa komputasional). Di bagian contoh korpus terdapat tautan *uraikan*. Jika pengguna memilih tautan tersebut, pengguna akan melihat laman berisi pohon sintaksis dan representasi semantik kalimat yang dipilih. Informasi pohon sintaksis dan representasi semantik tersebut diambil dari Treebank yang ada.

Home Lex Types Rules Lemma: lemma Go Type: lextype, rule or type Go

## aj\_-\_i-color-er\_le (ltype)

### Linguistic Documentation

Adj, color, only -er comparative

**ex** The cat is gray.

None

### Lexical Examples: 3 (3 out of 10: [more](#))

lexid	Lemma	Surface	Frequency
white_a1	white	white, white-, white,, white., white.", "white,	122
black_a1	black	black, black-, black,, black., (black, "black, black.",	113
yellow_a1	yellow	yellow, yellow,, yellow., yellow-,	15

### Corpus Examples (3 out of 604: [more](#))

6015360: they passed the marmalade, the bread, the **black**- market butter, back and forth. ([parse](#))

3020131: already in 1909, in connection with a visit by norway 's new royal family, the large, **red**- painted building eidsburagden was described as "incomparably the most comfortable hotel in the jotunheimen." ([parse](#))

3300333: these skies are best described as unforgettable, as they are perfectly framed by the jagged peaks of the lofoten 's razorback mountains and the rich **blue** waters surrounding the island. ([parse](#))

### Type Information

aj - i-color-er le := aj - i-color lexent &

**Gambar 4**  
**Tangkapan Layar Laman Dokumentasi Salah Satu Tipe Leksikal di ERG**

Tahap awal pengembangan TBBI Daring Terpadu adalah dengan penggunaan LTDB yang berisi dokumentasi tipe-tipe leksikal dan aturan-aturan tata bahasa yang ada di INDRA. Dalam bab berikut ini dibahas fenomena kebahasaan konstruksi kopula dalam bahasa Indonesia, analisis dan model HPSG yang telah dibuat beserta implementasinya di INDRA, serta tampilan laman LTDB (TBBI Daring).

## PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas salah satu fenomena kebahasaan yang telah dianalisis dan diimplementasikan di INDRA, yaitu konstruksi kopula dasar (Moeljadi, 2016). Analisis kopula dalam bahasa Indonesia telah ditulis di berbagai buku tata bahasa, misalnya Alwi *et al.*, (2014) dan Sneddon *et al.*, (2010). Alwi *et al.* (2014) menulis bahwa kalimat berpredikat nominal, kalimat persamaan, atau kalimat ekuatif dapat menggunakan *adalah* untuk memisahkan subjek dari predikat. Kata *adalah* dapat disulih dengan *ialah* atau *merupakan*. Sneddon *et al.*, (2010) menambahkan bahwa *ialah* dapat digunakan jika subjeknya ialah orang ketiga karena *ialah* berasal dari kata *ia*. Contoh (6) menunjukkan bahwa *saya* tidak dapat menjadi subjek konstruksi kopula dengan *ialah*.

(6) Saya (adalah/\*ialah/merupakan) guru.



Moeljadi *et al.*, (2016) menyatakan bahwa *merupakan* adalah verba yang sedang dalam proses menjadi kopula. Verba *merupakan* tidak dapat digunakan jika predikat nominal bersifat spesifik, misalnya nama diri, demonstrativa, atau pronomina (lihat Contoh (7)). Dengan kata lain, *merupakan* digunakan jika predikat nominal adalah kata benda umum (*common noun*).

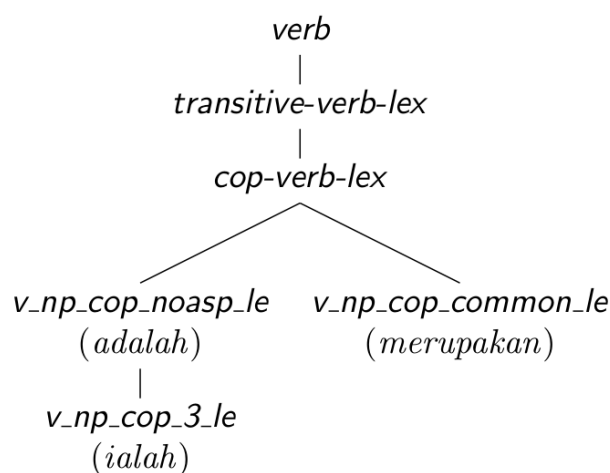
(7) Orang itu (adalah/ialah/\*merupakan) Budi.

Verba *merupakan* dapat didahului oleh pewatas depan, sedangkan *adalah* dan *ialah* tidak. (lihat Contoh (8)).

(8) Ini sudah/akan \*adalah/\*ialah/merupakan hal yang luar biasa.

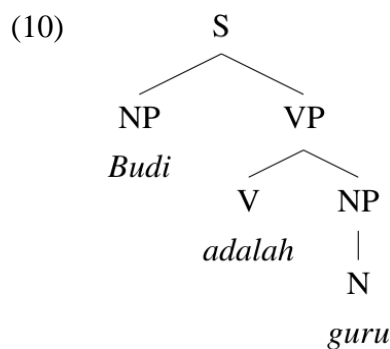
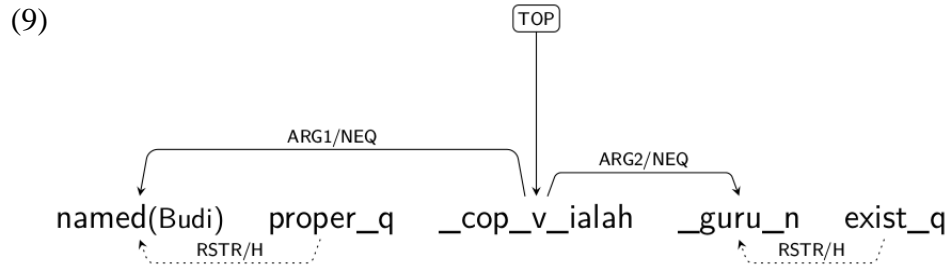
Analisis di atas diperoleh berdasarkan data korpus bahasa Indonesia yang ada di Nanyang Technological University Multilingual Corpus (NTU-MC) (Tan dan Bond, 2012) yang berisi 2.975 kalimat.

Verba kopulatif *adalah*, *ialah*, dan *merupakan* memiliki dua argumen yang secara sintaksis menyerupai verba transitif. Verba-verba kopulatif tersebut dapat digolongkan secara terperinci, seperti yang ditunjukkan melalui hierarki tipe leksikal pada Gambar 5. Semua verba kopulatif berasal dari tipe atau kelas kata verba (*verb*), khususnya verba transitif (*transitive-verb-lex*). Karena verba kopulatif berbeda dengan verba transitif lain, misalnya tidak memiliki bentuk pasif, verba kopulatif memiliki tipe sendiri (*cop-verb-lex*). Karena *adalah* dan *ialah* tidak dapat didahului pewatas depan, sedangkan *merupakan* dapat didahului pewatas depan, tipe verba kopulatif perlu dibagi lagi menjadi dua tipe: (1) yang dapat didahului pewatas depan (*v\_np\_cop\_common\_le*), yaitu *merupakan*, dengan batasan predikat nominal harus bertipe kata benda umum (*common noun*); dan (2) yang tidak dapat didahului pewatas depan (*v\_np\_cop\_noasp\_le*), yaitu *adalah* dan *ialah*, dengan batasan tanpa pewatas depan. Karena *ialah* hanya dapat digunakan jika subjeknya orang ketiga, *ialah* memiliki tipe sendiri, yaitu *v\_np\_cop\_3\_le*, dengan batasan subjek harus orang ketiga.



**Gambar 5**  
**Pembagian Kelas Kata Verba Kopulatif**

Representasi MRS kalimat kopula mirip dengan MRS kalimat transitif, seperti ditunjukkan pada Contoh (9) untuk kalimat *Budi ialah guru* dengan argumen 1 (ARG1) merujuk pada Budi dan argumen 2 (ARG2) merujuk pada guru. Pohon sintaksis kalimat *Budi adalah guru* ditunjukkan pada (10).



Home LexTypes Rules    Lemma:     Go    Type:     Go

**v\_np\_cop\_common\_le (ltype)**

**Lexical Examples: 1 (1)**

lexid	Lemma	Surface	Frequency
	merupakan	merupakan	6

**Corpus Examples (3 out of 6: [more](#))**

1049: makanan yang **merupakan** makanan utama seperti beras jagung gandum dan lain<sup>9</sup> makanan yang merupakan makanan utama seperti beras jagung gandum dsb ([parse](#))

1794: susu mumi yang **merupakan** hasil pemerahan susu mumi yang merupakan hasil pemerahan ([parse](#))

1796: susu tepung yang **merupakan** hasil pengolahan atau pengeringan air susu yang lemak -nya telah diambil susu tepung yang merupakan hasil pengolahan atau pengeringan air susu yang lemak -nya telah diambil ([parse](#))

**Type Information**

```
v_np_cop_common_le := cop-verb-lex &
[ SYNSEM [ LOCAL [ CAT [ VAL [ COMPS [ FIRST [ LOCAL [ CAT [ HEAD commonnoun ] ] ],
                                REST null ] ] ],
                                HEAD copula-stative ] ] ] ].
```

Supertypes	Head	Category	Valence	Content	Subtypes	Arity	head
cop-verb-lex	copula-stative		valence		mrs		

**Gambar 6**  
Tangkapan Layar Laman Salah Satu Tipe Verba Kopulatif di INDRA



Gambar 6 menunjukkan laman LTDB untuk INDRA (yang berpotensi dikembangkan menjadi TBBI Daring Terpadu). Laman tersebut berisi dokumentasi tipe leksikal untuk verba kopulatif *merupakan*. Tampilan yang ada saat ini menggunakan menu dalam bahasa Inggris, tetapi akan diubah ke dalam bahasa Indonesia. Ke dalam laman tersebut akan ditambahkan pula dokumentasi linguistik di bagian awal laman. Desain laman juga dapat diperbaiki dan dipercantik. Saat ini laman tersebut berisi: (1) contoh leksikal: bentuk dasar atau lema, bentuk permukaan yang ada di korpus, dan frekuensi atau jumlah kemunculan di korpus; (2) contoh-contoh klausa atau frasa yang mengandung kata *merupakan* yang ditemukan di korpus beserta pilihan untuk menguraikan contoh klausa atau frasa tersebut (jika dipilih, akan muncul pohon sintaks dan representasi semantiknya); (3) informasi tipe leksikal, yang berisi implementasi kode di INDRA dengan batasan-batasannya, misalnya predikat nominal harus berupa kata benda umum (*common noun*) dan diturunkan dari tipe *cop-verb-lex* (informasi frekuensi dan contoh klausa atau frasa, serta pohon sintaksis dan representasi semantik diambil dari Treebank JATI).

Informasi tipe leksikal atau kelas kata yang terperinci seperti ini (verba kopula, verba transitif, dsb.) dapat memperkaya informasi kelas kata yang ada di KBBI. Saat ini informasi kelas kata di KBBI hanya berupa nomina, verba, adjektiva, adverbial, pronomina, numeralia, dan partikel. Bukan tidak mungkin apabila di kemudian hari informasi kelas kata yang terperinci, misalnya nomina bernyawa, nomina takbernyawa, nomina terbilang, nomina takterbilang, nomina kolektif, verba intransitif, verba transitif, dan verba kopulatif dapat diwujudkan melalui TBBI Daring ini. Selain untuk kepentingan dokumentasi bahasa dan pengayaan kamus (KBBI), TBBI Daring berpotensi dimanfaatkan untuk pengolahan data teks bahasa Indonesia, pengecekan tata bahasa dan kebakuan kalimat, pembelajaran bahasa Indonesia dengan bantuan komputer, dan penerjemahan dengan mesin karena kemampuan menguraikan dan menghasilkan kalimat-kalimat baku bahasa Indonesia dan hubungannya dengan tata bahasa komputasional bahasa-bahasa lain menggunakan representasi semantik yang sama.

## PENUTUP

Dalam makalah ini dibahas aspek-aspek pengembangan pangkalan data dan laman TBBI Daring Terpadu tahap awal, yang dimulai dari pembahasan tentang rekayasa tata bahasa, landasan teori HPSG dan MRS, metode penelitian, tata bahasa komputasional bahasa Indonesia INDRA, pangkalan data tipe linguistik LTDB, hingga pembahasan salah satu fenomena kebahasaan konstruksi kopula dari analisis sampai tampilan laman LTDB (TBBI Daring). TBBI Daring Terpadu berpotensi menjayakan bahasa Indonesia, terutama dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bahasa Indonesia, melalui dokumentasi tata bahasa baku bahasa Indonesia dan aplikasi-aplikasi pengolahan teks bahasa Indonesia. TBBI Daring Terpadu perlu dikembangkan lebih lanjut dari segi linguistik, komputasional, serta desain dan tampilan laman. Dari segi linguistik, analisis dan implementasi fenomena kebahasaan, seperti konstruksi adjektival, perlu ditambah. Dari segi komputasional, leksikon yang ada dapat ditambah dan diintegrasikan dengan pangkalan data KBBI Daring. Selain itu, Treebank yang ada dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menganotasi



kalimat-kalimat yang terdapat dalam Korpus Indonesia. Karena begitu luasnya fenomena kebahasaan yang ada, pengembangan TBBI Daring Terpadu ini selayaknya dilakukan secara bertahap.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa, dan Anton M. Moeliono. (2014). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amalia, Dora (ed.). (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Arka, I Wayan. (2012). “Developing A Deep Grammar of Indonesian Within The Pargram Framework: Theoretical And Implementational Challenges”. Dalam *26th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation* (hlm. 19—38).
- Bender, Emily M., Dan Flickinger, dan Stephan Oepen. (2011). “Grammar Engineering and Linguistic Hypothesis Testing: Computational Support for Complexity in Syntactic Analysis”. Dalam *Language from a Cognitive Perspective: Grammar, Usage and Processing* (hlm. 5—29). Stanford: CSLI Publications.
- Bender, Emily M. dan Antske Sibelle Fokkens. (2010). *The LinGO Grammar Matrix: Rapid Grammar Development for Hypothesis Testing*. URL <http://www.delph-in.net/matrix/hpsg2010/hpsg-tutorial.pdf>.
- Chomsky, Noam. (1956). “Three models for the description of language”. *IRE Transactions on Information Theory*, 2(3): 113—124.
- Copestake, Ann. (2002). *Implementing Typed Feature Structure Grammars*. Stanford: CSLI Publications.
- Copestake, Ann, Dan Flickinger, Carl Pollard dan Ivan A. Sag. (2005). “Minimal Recursion Semantics: An Introduction”. *Research on Language and Computation*, 3(4): 281—332.
- Dalrymple, Mary. (2001). *Lexical-Functional Grammar. Syntax and Semantics 34*. Academic Press.
- Fan, Zhenzhen, Sanghoun Song dan Francis Bond. (2015). “An HPSG-based Shared-Grammar for the Chinese Languages: Zhong [!]”. Dalam *Proceedings of the Grammar Engineering Across Frameworks (GEAF) Workshop, 53rd Annual Meeting of the ACL and 7th IJCNLP* (hlm. 17—24).
- Flickinger, Dan. (2000). “On Building a More Efficient Grammar by Exploiting Types”. *Natural Language Engineering*, 6(1): 15—28.
- Flickinger, Dan, Yi Zhang dan Valia Kordoni. (2010). *Grammar Engineering for Deep Linguistic Processing: Project Seminar 2010*. URL <http://www.coli.uni-saarland.de/~yzhang/ge-ss10/lecture-01.pdf>.
- Hashimoto, Chikara, Francis Bond, dan Dan Flickinger. (2007). “The Lextype Db: A Web-Based Framework for Collaborative Multilingual Grammar And Treebank Development”. Dalam *The First International Workshop on Intercultural Collaboration (IWIC-2007)* (hlm. 44—58). Kyoto.
- Kaplan, Ronald dan Joan Bresnan. (1982). “Lexical Functional Grammar: A Formal System for Grammatical Representation”. Dalam *The Mental Representation of Grammatical Relations* (hlm. 173—281). Cambridge: the MIT Press.



- Kwary, Deny A. (2018). “Towards the First Online Indonesian National Corpus”. Makalah akan diterbitkan dalam *Proceedings of Fourth Asia Pacific Corpus Linguistics Conference (APCLC 2018)*.
- Moeljadi, David. (2017). “Building JATI: A Treebank for Indonesian”. Dalam *Proceedings of The 4th Atma Jaya Conference on Corpus Studies (ConCorps 4)* (hlm. 1—9). Jakarta.
- Moeljadi, David, Francis Bond, dan Luís Morgado da Costa. (2016). “Basic Copula Clauses in Indonesian”. Dalam *Proceedings of the Joint 2016 Conference on Head-driven Phrase Structure Grammar and Lexical Functional Grammar* (hlm. 442—456). Warsaw.
- Moeljadi, David, Francis Bond dan Sanghoun Song. (2015). “Building an HPSG-based Indonesian Resource Grammar (INDRA)”. Dalam *Proceedings of the Grammar Engineering Across Frameworks (GEAF) Workshop, 53rd Annual Meeting of the ACL and 7th IJCNLP* (hlm. 9—16).
- Moeljadi, David, Ian Kamajaya, dan Dora Amalia. (2017). “Building the Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Database and Its Applications”. Dalam Hai Xu (ed.), *Proceedings of the 11th International Conference of the Asian Association for Lexicography* (hlm. 64—80). Guangzhou: The Asian Association for Lexicography Center for Linguistics and Applied Linguistics, Guangdong University of Foreign Studies.
- Pollard, Carl dan Ivan A Sag. (1994). *Head-driven phrase structure grammar*. University of Chicago Press.
- Sag, Ivan A., Thomas Wasow dan Emily M. Bender. (2003). *Syntactic Theory: A Formal Introduction*. Stanford: CSLI Publications.
- Siegel, Melanie, Emily M. Bender dan Francis Bond. (2016). *Jacy: An Implemented Grammar of Japanese*. Stanford: CSLI Publications.
- Sneddon, James Neil, Alexander Adelaar, Dwi Noverini Djenar dan Michael C. Ewing. (2010). *Indonesian Reference Grammar*. New South Wales: Allen dan Unwin.
- Tan, Liling dan Francis Bond. (2012). “Building and Annotating the Linguistically Diverse NTU-MC (NTU-multilingual corpus)”. *International Journal of Asian Language Processing*, 22(4): 161—174.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 2 Kelompok 3**

Judul : “Pengembangan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TBBI) Daring Terpadu”  
Pembicara : David Moeljadi  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.00  
Moderator : Agus Sri Danardhana  
Pencatat : Anita Astriawati Ningrum

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. TBBI merupakan salah satu produk Badan Bahasa yang belum didaringkan, tetapi sering digunakan sehingga berpotensi untuk didaringkan.
2. Dengan TBBI daring, tata bahasa baku bahasa Indonesia dapat didokumentasikan secara digital dengan tata bahasa komputasional.
3. Tata bahasa komputasional adalah kumpulan aturan tata bahasa dan leksikon yang telah dirumuskan secara detail dan eksplisit dan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer sehingga dapat diproses secara otomatis dengan metode rekayasa tata bahasa.
4. Tata bahasa komputasional bahasa Indonesia berlisensi sumber terbuka yang berpotensi digunakan dalam pengembangan TBBI daring terpadu adalah INDRA (*Indonesian Resource Grammar*).
5. Makalah ini berfokus pada pembahasan aspek-aspek pengembangan pangkalan data dan laman TBBI daring tahap awal.
6. Bidang rekayasa tata bahasa mirip dengan dokumentasi bahasa karena berusaha mendeskripsikan bahasa sebagaimana dituturkan oleh penutur jati, tetapi berfokus pada sintaksis dan semantik. Rekayasa tata bahasa juga memanfaatkan komputer dalam pengecekan konsistensi analisis dan pemodelan tata bahasa.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Totok Suhardianto  
Instansi : Universitas Indonesia

**Pertanyaan:**

Sistem data tersebut tertutup atau terbuka? Untuk Treebank dapat diperoleh atau tidak?

**Jawaban:**

Korpus dari INDRA dan Treebank dapat diunduh.

**Penanya 2**

Nama : Firman Aziz  
Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia



**Pertanyaan:**

Pada KBI X TBBI daring sudah diwacanakan. Namun, mengingat tata bahasa baku bahasa Indonesia sangat beragam, jadi hal itu sulit dilakukan. Yang dipresentasikan oleh Saudara adalah tata bahasa normatif. Rujukan mana yang akan dipakai (akar)? Tata bahasa mana yang akan dipakai?

**Jawaban:**

Tata bahasa yang digunakan memang tata bahasa formal, salah satunya pedomannya adalah Kelas Kata Harimurti Krida Laksana.

**Isu-Isu Penting:**

Linguistik komputasional sangat berperan dalam pengembangan berbagai aplikasi data bahasa (dan sastra) daring.



### 3. Penggunaan Bahasa dan Sastra dalam Teknologi Informasi sebagai Penguat Karakter Bangsa

#### PENGUNAAN BAHASA DAN SASTRA DALAM TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PENGUAT KARAKTER BANGSA

Ivan Lanin

ivanlanin@gmail.com

##### Abstrak

Dengan munculnya gelombang peradaban ekonomi informasi dan ekonomi kreatif, dunia memasuki era digital yang ditunjang oleh teknologi informasi. Pada era ini, kekuatan sumber daya manusia sangat diperlukan. Keterampilan yang diperlukan oleh SDM akan berubah pada era digital. Pemerintah Indonesia menyikapi tren ini dengan penguatan pendidikan karakter (PPK) yang memiliki lima nilai utama karakter prioritas dan empat dimensi pendidikan karakter. Penggunaan bahasa dan sastra dalam PPK dilandaskan pada tiga fungsi bahasa, yaitu alat komunikasi, ekspresi, dan sosial. Terdapat empat pemberdaya untuk mewujudkan empat fungsi bahasa itu, yaitu keterampilan, kesantunan, kewawasan, dan kebanggaan berbahasa. Untuk mengejawantahkan hal itu, ada lima usulan peran yang perlu diambil Badan Bahasa, yaitu menyangkut sumber daya, contoh, pembinaan, alat evaluasi, dan teknologi bahasa.

**Kata kunci:** bahasa Indonesia, teknologi informasi, ekonomi kreatif, era digital

##### Abstract

*With the advent of the wave of civilization in information economy and creative economy, the world entered a digital era that was supported by information technology. In this era, the power of human resources is very necessary. The skill needed by humans will change in the digital era. The Indonesian Government addresses this trend by strengthening character education, which has five main values of priority characters and four dimensions of characters building education. The use of language and literature in characters building education is based on three language functions, i.e. communication, expression, and social tools. There are four empowerers to realize the four functions of language, i.e. skills, politeness, insight, and language pride. To embody this, there are five proposed roles that need to be taken by Agency of Language Development and Cultivation, i.e. concerning resources, examples, guidance, evaluation tools, and technology.*

**Keywords:** Indonesian language, information technology, creative economy, digital era

#### PENDAHULUAN

Dalam bukunya, *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas* (2001), Howkins menyebut dunia kini berada dalam gelombang peradaban ekonomi kreatif. Gelombang ini menyusul gelombang sebelumnya, yaitu ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Republik Indonesia mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai penciptaan





nilai tambah dari kreativitas yang dilindungi kekayaan intelektual dan bersumber dari pengelolaan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Perkembangan ekonomi informasi dan ekonomi kreatif didukung oleh teknologi informasi. Teknologi informasi adalah penggunaan teknologi (seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi) untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Dengan kata lain, saat ini dunia sedang memasuki era digital.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) menjadi sumber daya yang menentukan pada era digital, khususnya untuk ekonomi kreatif. Pada laporan bertajuk *The Future of Jobs* (2016), World Economic Forum (WEF) mengungkap bergesernya syarat keterampilan yang diperlukan seseorang antara tahun 2015 dan tahun 2020 nanti. Empat keterampilan yang diperkirakan oleh WEF akan naik daun pada tahun 2020 adalah kreativitas, kecerdasan emosional, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif (keuletan).

Guna menyikapi tren gelombang peradaban ekonomi kreatif dan pergeseran kebutuhan keterampilan ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 (Perpres 87/2017) tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurunkan lima nilai utama karakter prioritas PPK, yaitu religius, integritas, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Nilai-nilai utama tersebut dibangun melalui empat dimensi pendidikan karakter, yaitu olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga.

## **PEMBAHASAN**

Bahasa dan sastra dapat turut berperan sebagai penguat karakter bangsa. Peran bahasa dan sastra dapat dilihat dari fungsinya sebagai alat komunikasi, alat ekspresi, dan alat sosial. Alat komunikasi berarti bahasa berfungsi menyampaikan gagasan; alat ekspresi berarti bahasa berfungsi menyampaikan rasa dan emosi; alat sosial berarti bahasa berfungsi untuk identifikasi dan adaptasi dengan lingkungan sosial.

Guna mewujudkan ketiga fungsi bahasa dan sastra tersebut, individu Indonesia perlu memiliki empat pemberdaya (*enabler*), yaitu keterampilan berbahasa, kesantunan berbahasa, kewawasan (*mindfulness*) berbahasa, dan kebanggaan berbahasa. Keterampilan berbahasa meliputi empat jenis keterampilan, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kesantunan berbahasa meliputi enam maksim, yaitu kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kerendahanhatian, kesetujuan, dan simpati (Leech, 1983). Kewawasan berbahasa secara cermat memperhatikan segala tindak kebahasaan.

## **PENUTUP**

Sebagai lembaga negara yang mengurus bahasa dan sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) memiliki posisi penting dalam penggunaan bahasa dan sastra sebagai penguat karakter bangsa pada era digital atau era teknologi informasi. Ada lima peran yang perlu dilakukan Badan Bahasa, yaitu (1) menyediakan sumber daya kebahasaan daring terbuka secara urun daya, (2) mengembangkan contoh daring penggunaan bahasa dan sastra, (3) melaksanakan pembinaan terhadap media kebahasaan dan kesastraan daring, (4) menyiapkan alat evaluasi keterampilan berbahasa secara daring, serta (5) memfasilitasi pengembangan teknologi bahasa oleh pemangku kepentingan.



Sebagian besar orang Indonesia beruntung berada pada kondisi triglot, yaitu menguasai tiga bahasa. Manfaatkanlah anugerah itu. Utamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi; lestarikan bahasa daerah agar kita tidak tercerabut dari akar budaya kita; kuasai bahasa asing agar kita tidak dikuasai oleh bangsa asing.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- John, Howkins. (2001). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. USA: Penguin Group (USA) Incorporated.
- Leech, G. N. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Gelar Wicara 13**

Judul : “Penggunaan Bahasa dan Sastra dalam Teknologi  
Informasisebagai Penguat Karakter Bangsa”  
Pembicara : Ivan Lanin  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 08.00—10.00  
Ruang : Puri Agung  
Moderator : Drs. Abdul Khak, M.Hum.  
Pencatat : 1. Elvi Suzanti  
2. Inayatushalihah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah dari kreativitas yang dilindungi kekayaan intelektual, dan bersumber dari pengelolaan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi
2. Teknologi informasi adalah penggunaan teknologi untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital.
3. Keterampilan masa depan: kreativitas, kecerdasan emosional, negosiasi, fleksibilitas kognitif
4. Fungsi bahasa: komunikasi, sosial, ekspresi (keterampilan, kesantunan, kewawasan, kebanggaan.

**Isu-Isu Penting:**

Badan Bahasa seharusnya

1. menyediakan sumber daya kebahasaan daring terbuka secara urun daya;
2. mengembangkan contoh daring penggunaan bahasa dan sastra;
3. melakukan pembinaan terhadap media kebahasaan dan kesastraan daring;
4. menyiapkan alat evaluasi keterampilan berbahasa secara daring; dan
5. memfasilitasi pengembangan teknologi bahasa oleh pemangku kepentingan.



#### 4. Multimedia Kritik Sastra

### MULTIMEDIA KRITIK SASTRA *The Multimedia of Literary Criticism*

**Dessy Wahyuni**  
Universitas Gadjah Mada

#### **Abstrak**

Benarkah kritik sastra sedang mengalami krisis di Indonesia? Belakangan ini, perkembangan karya sastra di Indonesia sangat pesat, bahkan tidak terbendung. Karya-karya itu bermunculan dari berbagai penjuru, baik dari penulis yang tua (senior) maupun yang muda (pemula). Untuk dapat menghasilkan karya yang lebih bermutu ke depannya, sebuah karya yang telah lahir harus mendapatkan apresiasi atau kritik. Akibat kritikan itu, karya yang akan lahir berikutnya, idealnya, mengalami perbaikan. Akan tetapi, tidak sedikit pandangan yang muncul mengatakan bahwa kritik sastra di Indonesia sedang mengalami krisis. Bahkan, beberapa pendapat mengatakan bahwa dengan pesatnya perkembangan dunia digital atau daring (*online*), kritik sastra di Indonesia berada dalam kondisi “mati suri” karena kehilangan lahan utamanya, yakni sejumlah majalah sastra. Peringatan 50 Tahun Majalah *Horison* di TIM pada Juli 2016 lalu yang hanya menyisakan edisi daring, menjadi penanda “berakhirnya” dunia kritik sastra. Benarkah demikian? Berdasarkan fenomena yang terjadi, melalui studi pustaka, dalam makalah ini dibahas permasalahan yang membayangi kritik sastra di Indonesia akibat perkembangan dunia digital tersebut. Dalam tulisan ini juga dibahas cara menyikapi tantangan yang ada sehingga dapat menjadi peluang bagi keberlangsungan kritik sastra. Dengan demikian, tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui permasalahan kritik sastra di Indonesia pada era globalisasi ini dan upaya mengatasi permasalahan tersebut.

**Kata-kata kunci:** krisis; kritik; sastra; multimedia; globalisasi

#### **Abstract**

*Is it true that literary criticism is in crisis in Indonesia nowadays? Recently, the development of literary works in Indonesia is very rapid, even unstoppable. The works are emerging from various directions, both from older writers (seniors) and young writers (beginners). In order to be able to produce more quality work in the future, a work that has been born should get appreciation or criticism. As a result of the criticism, the work that will be born in the future, ideally, has improved. However, not a few emerging opinions stated that literary criticism in Indonesia is undergoing a crisis. Even some opinions said that with the rapid development of the digital world and online, literary criticism in Indonesia is in a state of "torpidity", due to losing of their main media in expressing themselves, namely a number of literary magazines. The 50th anniversary of Horison Magazine at TIM in July 2016, which left only the online edition, marks the "ending" of the world of literary criticism. Is that true? Based on the phenomenon that occurs, through literature study, this paper discussed the problems that overshadow the literary criticism in Indonesia due to the development of the digital world. This paper also discussed how to address the challenges that exist so as to be an opportunity for*



*the continuity of literary criticism. Thus, the purpose of this paper is to identify the problems of literary criticism in Indonesia in this era of globalization and efforts to overcome these problems.*

**Keywords:** *crisis; criticism; literature; multimedia; globalization*

## **PENDAHULUAN**

Sastra adalah entitas yang unik, dinamis, dan multitafsir. Sastra kerap bersentuhan dengan ranah batin dan memberikan sesuatu yang tidak kasat mata. Kata-kata yang memiliki nilai seni dan budaya ini merupakan sebuah keindahan dengan makna tertentu. Makna tersebut akan terkuak jika diapresiasi. Melalui proses apresiasi itu, karya sastra akan menghasilkan nilai-nilai kemanusiaan yang mengendap dalam khazanah batin pembaca/penikmat sastra.

Akhir-akhir ini perkembangan karya sastra di Indonesia sangat pesat, bahkan tidak terbendung. Penulis karya sastra bermunculan dari berbagai penjurur, baik yang tua (senior) maupun yang muda (pemula). Itu semua dapat dilihat pada media massa (tiap Sabtu dan/atau Minggu) yang biasanya menampilkan satu atau dua cerpen serta banyak puisi setiap minggunya. Novel-novel terbit. Antologi cerpen dan puisi menyemarak. Selain itu, sejumlah karya sastra di dunia maya pun bermunculan. Hal itu seakan menggambarkan bahwa sastra telah menjadi idola tersendiri di negeri ini. Tentu saja hal ini merupakan kabar baik bagi perkembangan kesastraan Indonesia. Akan tetapi, apakah masih kabar baik namanya jika perkembangan itu tidak diikuti oleh apresiator/kritikus sastra?

Sastra Indonesia sebenarnya berkembang pesat karena cukup menarik. Di Indonesia perkembangan sastra sudah berlangsung sejak lama. Ditemukannya peninggalan berupa tulisan kuno telah menjadi bukti bahwa pada waktu itu manusia telah mengenal bahasa sekaligus sastra. Sejalan dengan perkembangan zaman, tulisan mengenai nasihat keagamaan dan adat-istiadat pun terlihat. Selanjutnya, pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sastra kerap dijadikan polemik yang memicu kontroversi karena digunakan sebagai media untuk mengkritik berbagai bentuk penindasan dan pola pemerintahan. Hingga kini, sastra Indonesia terus berkembang. Karya sastra dijadikan media berimajinasi bagi sastrawan dalam menanggapi perkembangan sosial, politik, spiritual, dan sebagainya dalam menghasilkan sebuah karya yang inovatif dan bernilai.

Di Riau juga demikian. Perkembangan sastra di Riau saat ini memperlihatkan luka sejarah, penderitaan panjang puak Melayu, marginalisasi masyarakatnya, serta tangis masyarakat atas kesewenangan para pendatang-penjajah-penjarah. Hal itu juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.

Akan tetapi, bagaimana mungkin masyarakat dapat mengetahui isi dan maksud sebuah karya sastra yang ditulis oleh pengarangnya jika tidak mengapresiasinya?

Eksistensi dan perkembangan sastra sejatinya tidak dapat lepas dari peran serta kritikus sastra. Tidak sedikit, memang, pengarang yang menganggap kritik sastra sebagai “nyanyian kosong”. Mereka menganggap kritikan tersebut sebagai angin lalu, sedangkan mereka akan terus berkarya. Padahal, disadari atau tidak, dengan adanya kritik sastra ini para pengarang akan berusaha meningkatkan kualitas karya mereka. Selain itu, kritik sastra ini juga dapat berfungsi sebagai alat kontrol agar hasil karya para pengarang tersebut tidak membahayakan eksistensi



mereka. Tanpa adanya kritik sastra, karya sastra akan berjalan liar. Oleh sebab itulah, kritik sastra dianggap penting dan tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Sayangnya, banyak pandangan yang mengatakan bahwa fungsi kritik sastra di Indonesia tengah mengendur sehingga kritik sastra mengalami krisis. Bahkan, beberapa pendapat mengatakan bahwa dengan pesatnya perkembangan dunia digital, kritik sastra di Indonesia berada dalam kondisi “mati suri” karena kehilangan lahan utamanya, yakni sejumlah media massa dan majalah sastra.

Peringatan 50 Tahun Majalah *Horison* di TIM pada Juli 2016 lalu yang hanya menyisakan edisi daring, bagi banyak orang, menjadi penanda “berakhirnya” dunia kritik sastra. Berhenti terbitnya majalah *Horison* tersebut dianggap tragedi yang memilukan bagi dunia sastra dan dunia literasi di tanah air. Mati atau berhentinya penerbitan majalah cetak, dengan alasan migrasi ke bentuk daring, sesungguhnya bukan hanya dialami oleh majalah *Horison*. Saat ini banyak majalah yang telah mempunyai nama besar dan berkibar di seluruh negeri, juga sedang berada di ambang “kematian”.

Namun, dengan matinya media cetak yang digadang-gadangkan mengusung kiprah kritik sastra di tanah air dan menjamurnya media daring, apakah benar telah menghentikan kehidupan kritik sastra?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengan menganalisis data yang ada, penulis menawarkan beberapa pemikiran. Perkembangan teknik multimedia, sebagai akar permasalahan, dapat dijadikan tantangan bagi para kritikus. Dengan demikian, sebagai upaya mengatasi permasalahan yang muncul, tantangan ini dapat dimanfaatkan menjadi peluang bagi keberlangsungan kehidupan kritik sastra di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

Wellek dan Warren (1976) mengatakan bahwa kritik sastra adalah salah satu cabang studi sastra di samping teori sastra dan sejarah sastra. Sastra, yang merupakan kegiatan penulisan kreatif, memerlukan seperangkat kaidah atau pengetahuan yang dapat digunakan untuk menganalisis karya sastra, baik dari sisi intrinsik dan ekstrinsik maupun sejarah perkembangannya. Teori, sejarah, dan kritik sastra itulah kaidah atau pengetahuan yang diperlukan.

Kritik sastra bermakna memahami karya sastra secara kritis. Kegiatan ini kerap diidentikkan dengan istilah timbangan, bedah karya, sorotan, tintingan, maupun ulasan terhadap karya sastra. Akan tetapi, kritik sastra sesungguhnya bukanlah menghakimi karya sastra.

Endraswara (2013) mengemukakan dua alasan dilakukan kritik terhadap karya sastra. Pertama, kritik sastra dilakukan agar karya sastra yang dihasilkan pengarang makin meningkat bobotnya. Karya sastra itu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik di waktu yang akan datang. Kedua, kritik sastra dilakukan agar karya sastra yang dihasilkan tidak menyimpang dari hal yang membahayakan eksistensi pengarang. Ia mengatakan bahwa kritik sastra harus dilakukan sebab sastra tanpa kritik akan berjalan liar. Sebaliknya, sastra akan berjalan humanis jika ada kritik.

## METODE PENELITIAN

Melalui penelitian deskriptif kualitatif dengan mengutamakan kualitas data, bukannya jumlah data (Moleong, 2007), dalam tulisan ini dibahas permasalahan



yang membayangi kritik sastra di Indonesia sebagai akibat menyemaraknya media daring. Dengan metode pengumpulan data yang menggunakan studi kepustakaan melalui teknik membaca dan mencatat berbagai informasi dari sumber data yang ada, penulis menawarkan beberapa pemikiran sebagai upaya mengatasi permasalahan yang muncul. Data yang ada dianalisis dengan metode deskriptif analitik melalui teknik interpretatif sehingga tantangan yang disebabkan oleh berkembangnya teknik multimedia ini dapat dijadikan peluang bagi keberlangsungan kehidupan kritik sastra di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Menyoal Kritik Sastra**

Kritik sastra adalah kegiatan dari mengapresiasi karya sastra. Saat mengapresiasi sastra, teks adalah sumber makna yang dimiliki pembaca. Artinya, pembaca akan melakukan penafsiran (makna) berdasarkan teks (sastra), bukan yang lain. Dengan demikian, jika terjadi perbedaan tafsir—tidak sama dengan yang dimaksudkan pengarang—tidak seharusnya pengarang berteriak histeris untuk menyangkal perbedaan itu. Dalam hal ini, pengarang dianggap sudah tidak ada. Pada akhirnya, pembacalah yang berkuasa atas teks sastra tersebut, seperti yang disebutkan Roland Barthes dalam artikelnya yang berjudul “The Death of the Author”. Intinya, tafsir karya tidak ada pada pengarang. Jika ada tafsir dari pengarang, itu statusnya sama dengan tafsir pembaca. Artinya, kedudukan pengarang dan pembaca sama, sama-sama menjadi penafsir karya (Maman, 2007).

Setelah sebuah karya sastra diciptakan dan dipublikasikan, pengarang harus rela berpisah dengan karyanya. Pembacalah yang kemudian mempunyai kemerdekaan penuh menafsirkan dan memaknai karya tersebut. Karya (sastra) itu telah menjadi milik publik dan pembaca berhak melakukan apa pun terhadapnya. Di sini, pengarang dianggap telah “mati”.

Mati dalam hal ini bukan berarti mati sesungguhnya. Pada saat sebuah karya sastra (baik itu puisi, cerpen, atau pun novel) dipublikasikan, seorang pengarang harus berbesar hati apabila ada pembaca yang mengapresiasi dan mengkritiknya. Bahkan, pengarang harus merasa senang karena ternyata karyanya diperhatikan publik. Dalam konteks ini, pembacalah yang berkuasa memberi makna atas teks tersebut. Pengarang tidak mempunyai kekuasaan apa pun untuk memengaruhi penafsiran, penilaian, dan pemaknaan yang diberikan oleh pembaca. Hal inilah yang dimaksudkan bahwa pengarang itu telah almarhun. Pengarang tidak berhak sedikit pun mencampuri penilaian pembaca terhadap karyanya, meskipun itu berbeda dengan tujuan pengarang dalam menghasilkan karyanya.

Menurut Suwardi Endraswara (2013), terdapat empat pendekatan kritik sastra. Pertama, kritik mimetik, yang memandang karya sastra sebagai pencerminan kenyataan kehidupan manusia. Kedua, kritik ekspresif, yang memandang karya sastra sebagai ekspresi, curahan perasaan, atau imajinasi pengarang. Ketiga, kritik pragmatik, memandang karya sastra sebagai sesuatu yang dibangun untuk mencapai efek-efek tertentu dari pembaca. Serta keempat, kritik objektif, memandang karya sastra sebagai karya itu sendiri, tidak dikaitkan dengan hal-hal di luar karya tersebut.

Tanpa mengungkapkan biografi pengarang, makna sebuah teks sastra bisa saja diperoleh: apa temanya, siapa saja tokoh-tokohnya, dan di mana, serta kapan latar cerita berlangsung. Namun, pemahaman makna terhadap karya sastra



tersebut hanya sebatas makna tekstual. Lantas, bagaimana persoalan di belakang dan di depan teks itu? Dengan “menghidupkan” kembali pengarangnya, setidaknya kita bisa mengungkapkan lebih banyak hal lagi, seperti ideologi pengarang, fakta historis yang menjadi bagian dari cerita, latar kultural yang berada di balik unsur-unsur intrinsik cerita tersebut, dan lain sebagainya.

Sebuah karya sastra terlahir dari sejumlah persoalan di belakang dan sekian harapan yang ada di depannya. Ada proses panjang dan tidak muncul begitu saja. Karya muncul dari proses pergulatan pemikiran pengarang dan berbagai budaya yang memengaruhinya. Sebuah teks menyimpan begitu banyak makna tersembunyi. Itu hanya bisa ditelusuri dan diungkap secara lebih lengkap jika melacak pengarangnya. Dalam hal ini, teks tidak sekadar tumpukan kalimat yang membentuk deretan alinea yang lalu membangun sebuah wacana. Akan tetapi, teks juga merupakan sebaran makna yang mengandung berbagai simbol, seperti kebudayaan, kepercayaan, dan sebagainya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam mengapresiasi sebuah karya, selayaknya tidak melepaskan dunia di luar dari teks itu. Upaya pemisahan teks dari pengarangnya merupakan musibah bagi kebudayaan yang terdapat di dalamnya. Upaya memisahkan teks dari pengarangnya merupakan langkah yang tidak semestinya. Penenggelaman pengarang hakikatnya sama dengan pengerdilan dan pemiskinan teks yang menyimpan begitu banyak kekayaan berbagai pesan budaya.

Langkah pertama penafsiran barangkali bisa dengan menelusuri makna melalui unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra tersebut. Namun, itu hanya sebatas makna tekstual. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa dalam sebuah karya sastra, terdapat roh yang tidak bisa dipisahkan dari teks, sebab roh itulah yang membuat sebuah karya menjadi hidup. Untuk itu perlu dilakukan penelusuran makna di sebaliknya, yakni kebudayaan yang menjadi roh teks tersebut. Menghadirkan kembali pengarang dalam teks sastra tidak menempatkan pengarang di atas segalanya, tetapi hanya sebuah upaya membongkar kekayaan teks dengan berbagai makna kultural yang tersembunyi di baliknya.

Dengan demikian, memberi kebebasan seluas-luasnya kepada pembaca, bukan berarti mematikan pengarang, karena menganggap teks sudah lengkap. Secara faktual, benar, teks sudah terlepas dari pengarangnya. Tetapi, secara kultural, teks itu tetap menyimpan roh kultural pengarangnya.

## **2. Kritik Sastra Akademis versus Kritik Sastra Umum**

Karya sastra sudah diciptakan orang jauh sebelum orang memikirkan apa hakikat sastra dan bagaimana nilai serta makna yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, kritik sastra baru dimulai setelah orang bertanya bagaimana nilai dan makna yang terdapat pada karya sastra tersebut. Jadi, antara orang yang menghasilkan karya sastra dengan orang yang menilai karya itu terjalin kerja sama.

Kritik sastra memiliki peranan penting dan kedudukan yang sama dengan teori dan sejarah sastra. Ketiga disiplin ilmu sastra itu saling berkaitan dan bertopangan, serta tidak ada yang lebih utama antara satu dan yang lain. Dalam hal ini, kritik sastra bukanlah ilmu yang hanya membahas baik-buruk suatu karya sastra, tetapi juga menjadi bagian yang penting dalam proses perkembangan teori





dan sejarah sastra yang kemudian akan menjadi parameter perkembangan atau perjalanan sejarah dan teori sastra tersebut (Suwondo, 2007).

Memasuki dunia kritik kadang dapat berarti memasuki dunia kegamangan dan penuh kecurigaan. Terdapat ruang-ruang tertentu yang harus disikapi secara hati-hati ketika memasuki dunia kritik. Dunia kritik dapat dikatakan sebagai “dunia bulimia”, saat seseorang memuntahkan kembali yang dia makan dengan alasan tertentu. Seorang kritikus kebanyakan adalah orang yang sudah memakan dan mengunyah sesuatu untuk kemudian “memuntahkannya” kembali dalam bentuk “baru”. Tentu saja produk muntahannya tidak akan sama dengan produk aslinya (Amin, 2007).

Akan tetapi, menurut Amin (2007), banyak pengarang yang menganggap pengkritik atau kritikus hanya akan menghancurkan sebuah tatanan yang sudah dibangun dengan baik dalam karyanya. Kritikus ini hanya dianggap sebagai orang yang tidak mampu, iri, dengki, dan setumpuk sifat negatif lainnya, yang kemudian menyerang orang lain dengan kritiknya. Inilah yang membuat dunia kritik memasuki wilayah kegamangan dan penuh kecurigaan sehingga terjadi pengotakan antara karya sastra dan kritik sastra.

Kritik sastra sebenarnya bukan menyangkut perihal bunuh-membunuh, mati-mematikan, merasa tersinggung, atau memperlakukan, karena masalahnya bukan itu. Kritik muncul karena pembaca melihat sesuatu dalam karya sastra, kemudian mencernanya dalam pikiran, mengapresiasi kelebihan dan kelemahan. Bisa saja terjadi proses selanjutnya, akibat kritikan, pengarang terpancing menghasilkan karya yang lebih bagus lagi.

Seperti yang diungkapkan oleh Santosa (1999) bahwa kritik sastra tidak sekadar menghakimi karya sastra itu bernilai baik dan buruk, melainkan lebih jauh menelaah dan menjelaskan kepada pembaca awam melalui kegiatan deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Masalah nilai baik dan buruk ini begitu relatif (nisbi) kebenarannya. Setiap orang memiliki ukuran (kriteria dan sistem norma) yang berbeda-beda dalam menilai karya sastra. Mengingat ada berbagai macam sudut pandang, tingkat intelektual, wawasan, motivasi, dan latar, ukuran menilai karya sastra yang deterministik pun menjadi sangat beragam.

Akan tetapi, Mahayana-tadi disebut “Maman” (2015) mengatakan begitu banyak sebenarnya jenis tulisan yang termasuk kategori kritik sastra. Kritik sastra itu boleh jadi memang berpretensi ilmiah, tetapi tidak keliru juga jika sekadar sebuah apresiasi. Pembaca yang menyampaikan kritiknya melalui tulisan, baik berupa esai ringan, ulasan apresiatif, resensi, atau makalah ilmiah dapat dikategorikan sebagai kritikus sastra.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa, terdapat dua jenis kritik sastra yang media dan sasarannya berbeda, yakni: kritik sastra ilmiah (kritik sastra akademis) dan kritik sastra umum. Kritik sastra ilmiah berada dalam dunia akademis. Dalam kritik akademis itu, kerangka teoretis dan metode ilmiah mutlak disertakan sebagai landasan argumen. Kritik sastra akademis bersifat tertutup dan mencakup para kritikus profesional, pengajar di perguruan tinggi, dan mahasiswa yang menulis untuk lingkungan sendiri. Kritik sastra akademis ini mencari keterangan dan penyusunan kembali berbagai konsep yang ada. Sementara, kritik sastra umum sasarannya adalah publik: masyarakat berbagai kalangan dengan latar belakang pendidikan yang beraneka ragam. Kritik sastra umum ini bersifat terbuka. Media yang digunakan bisa berupa majalah, surat kabar, buletin, ulasan



ringkas sebagai pengantar diskusi, dan sebagainya dan dibaca oleh khalayak ramai. Kritik sastra umum ini menyaring dan memilih berbagai hal yang membantu arus informasi (Mahayana, 2015; Damono, 1993).

Seorang kritikus harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikritiknya dan tidak bersikap angkuh seolah-olah tahu segalanya. Di samping itu, seorang kritikus harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam mengkritik. Dengan begitu, terjadi saling isi dan saling menyibak ketidaktahuan dan keluputan antara kritikus dan pengarang. Seorang kritikus bisa saja bermaksud menyampaikan sebuah pesan tersirat yang tidak tertangkap oleh pembaca awam. Apa yang diungkapkan seorang kritikus belum tentu sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si pengarang. Akan tetapi, setidaknya pengarang menjadi tahu bahwa jika dilihat dari sudut pandang tertentu karyanya akan memberikan makna yang berbeda. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan pengarang dalam menciptakan sebuah karya bisa leluasa dinikmati oleh pembaca.

Begitulah, kedua jenis kritik sastra itu memainkan peranannya di wilayah masing-masing. Keduanya terus berkembang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika perjalanan kesusastraan Indonesia. Kedua jenis kritik ini meneguhkan posisinya, membangun paradigma sendiri sejalan dengan sasaran dan harapan masyarakat pembaca. Keduanya menjalankan fungsi yang saling melengkapi; komplementer. Kedua jenis kritik ini sangat layak untuk diapresiasi sebagai kritik sastra.

### **3. Multimedia: Tantangan yang Menjadi Peluang**

Komputer yang dilengkapi teknik multimedia di era globalisasi ini menjadi dominan dalam kehidupan manusia. Meningkatnya peranan multimedia ini, secara langsung atau tidak, memengaruhi setiap lini pergerakan manusia. Perkembangan multimedia ini memberikan berbagai dampak, positif maupun negatif. Tentu saja hal ini bergantung pada cara individu atau kelompok tertentu dalam menyikapinya.

Konon, eksistensi kesastraan pun sangat terpengaruh oleh kehidupan masyarakat jejaring. Banyak yang meyakini, kehidupan kesastraan berada di ambang kepunahan sebagai akibatnya. Zaman dengan akses tanpa batas ini memberikan kebebasan dalam dunia maya untuk memberikan komentar apa pun terhadap berbagai hal (Awaludien, 2016). Setiap orang dapat menulis kritik yang dapat diakses dari berbagai penjuru dunia dengan munculnya situs jejaring sosial ini. Ruang terbuka tercipta dan mendapat respons dengan cepat. Akibatnya, semua orang bisa berbicara sekalipun hanya sebatas luapan emosi yang tidak terkontrol (Hidayat, 2017).

Inilah satu di antara fenomena yang ada ditafsirkan sebagai pengenduran fungsi kritik. Kedatangan era digital dan media sosial mengubah lanskap kritik sastra kita. Perdebatan sastra di surat kabar mulai digantikan oleh perdebatan (dan bahkan pertengkaran) sastra di media sosial. Yang jelas, kritik sastra dewasa ini telah mengalami migrasi ke habitat digital. Bukan hanya peralihan wahana (dari analog ke digital), yang menjadi pokok persoalan lebih lanjut adalah peralihan bentuk dan sifat kritik sastra tersebut. Kritik sastra yang ada di media cetak selama ini cenderung memiliki bentuk yang seragam (sesuai dengan kaidah bahasa tulis yang sopan dan sederhana), sedangkan kritik sastra di media sosial dengan teknik digital cenderung memungkinkan keragaman bentuk tanpa kaidah



(misal: bahasa lisan tanpa tanda baca; aneka diksi yang kurang pantas). Sifat kritik pun bergeser dari yang terfokus pada satu duduk perkara menyebar menjadi berbagai aspek tanpa sistematika (Suryajaya, 2017).

Sesungguhnya, keberadaan media sosial ini dapat dijadikan peluang bagi keberlangsungan kritik sastra kita. Seperti yang dikatakan Kori'un (2007) bahwa beberapa kelompok atau komunitas memanfaatkan keberadaan media sosial ini untuk memublikasikan karya dan berdiskusi mengenai kesastraan. Mereka dapat mengasah kemampuan di sini. Kebanyakan mereka merasa nyaman berekspresi di media sosial ini karena terbebas dari ruwetnya berurusan dengan redaktur sastra media massa. Mereka tetap berkarya dengan mendapat masukan dari peserta yang lain. Memang, pada saat karya mereka dipublikasikan di media maya, mereka kurang memperhatikan kualitas. Akan tetapi, pada saat karya mereka akan dibuat antologi, seleksi ketat tetap dilakukan untuk mendapatkan karya yang lebih baik.

Pada kenyataannya, penyebab kritik sastra terpinggirkan bukan hanya merebaknya multimedia dan situs jejaring sosial. Ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa keberhasilan atau keabsahan kritik sastra bukan bergantung pada siapa yang membuat dan di mana dipublikasikan, melainkan kebermanasan atau sebuah kebaruan yang ada pada kritik itu (Alwi, 2015).

Sementara, yang terjadi adalah tidak semua kritikus mampu menilai dengan timbangan yang baik. Tidak jarang para kritikus menyampaikan kritik yang belum matang. Kritikus tersebut belum memahami karya secara mendalam, tetapi tanpa malu-malu menyiarkan kritik yang terkesan sembrono. Ada pula kritikus yang kerap tidak berani melakukan penilaian terhadap sebuah karya sastra. Barangkali silau oleh kebesaran nama pengarangnya, atau karya itu memang sulit untuk dicerna. Atau karena kritikus mendapat "titipan" dari pengarangnya sehingga kritik yang dihasilkan terkesan hanya berisi sanjung puji (Hardiningtyas, 2017; Amin, 2007).

Lantas, bagaimana menyikapi bobroknya kualitas kritik sastra yang dihasilkan para kritikus yang semacam itu?

Untuk meningkatkan gairah para kritikus sastra demi menghasilkan kritik yang bermutu dan tidak simpang-siur, salah satunya adalah dengan penyelenggaraan sayembara yang berujung pada pemberian anugerah. Sayembara Kritik Sastra yang ditaja Dewan Kesenian Jakarta, misalnya. Sayembara ini dianggap mampu menjadi acuan bersama bagi penulis kritik sastra.

Seperti yang disinyalir Suryajaya (2017), salah satu juri dalam Sayembara Kritik Sastra DKJ 2017, sayembara kritik sastra tingkat nasional sangat penting. Sayembara ini setidaknya memiliki tiga fungsi, yaitu: (1) memotret isu terkini sastra Indonesia kontemporer; (2) mendokumentasikan keragaman ekosistem kritik sastra Indonesia; dan (3) menjadi wahana penetapan tolok ukur bersama tentang pencapaian terbaik kritik sastra Indonesia. Sayembara Kritik Sastra DKJ ini dapat dikatakan sebagai media pengaderan kritikus sastra karena menetapkan empat kriteria pokok dalam penilaian, yaitu: (1) ketajaman dalam menelaah karya; (2) kritik yang ispriratif dan orisinal; (3) argumentasi yang meyakinkan; dan (4) keberanian menafsir dan kesegaran perspektif. Dengan menempatkan keempat kriteria tersebut, sayembara ini secara tidak langsung menetapkan arah bersama sebagai upaya pewujudan kritik sastra yang baik.

Hal lain yang menjadi kegelisahan kita mengenai arah "kematian" kritik sastra adalah merebaknya multimedia dan situs jejaring sosial yang ada di



dalamnya. Padahal, di zaman modern ini, multimedia dapat dimanfaatkan sebagai peluang meningkatkan mutu kritik sastra di Indonesia. Pemanfaatan tersebut dapat berupa blog-blog gratis di dunia maya. Blog ini lebih mirip laman (*website*) mini yang bisa dibuat sendiri oleh pemiliknya tanpa harus membayar *hosting* dan dengan mudah dapat diperbarui kapan saja diinginkan oleh pemiliknya. Selain itu, kritikus sastra akademis dapat memanfaatkan keberadaan jurnal elektronik untuk memublikasikan karyanya (Lukman, Atmaja, dan Hidayat, 2017).

Jurnal elektronik saat ini menjadi suatu kebutuhan mendesak dan wajib sebagai perangkat untuk memublikasikan hasil kritik. Penerbitan jurnal secara elektronik ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain: (1) memberi kemudahan dalam pengumpulan kritik oleh penulis, pengoreksian, pengeditan, pemublikasian, pengarsipan, dan pengindeksan; (2) menganut sistem akses berkelanjutan; (3) memiliki mutu kritik yang terukur sebab dikoreksi oleh sedikitnya dua orang mitra bestari; (4) mengurangi biaya penerbitan yang cenderung tinggi; (5) memiliki akses yang terbuka bagi pembaca dari berbagai kalangan (Support Scientific Communities, 2017).

Selama ini, penerbitan jurnal atau majalah sastra hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Namun, dengan adanya jurnal elektronik, siapa pun dapat menikmati kritik dari berbagai penjuru dengan mudah dan murah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya terdapat banyak jenis tulisan yang termasuk kategori kritik sastra. Kritik sastra itu bisa saja bersifat ilmiah, tetapi juga tidak salah jika hanya sekedar apresiasi. Bentuk kritik sastra, baik berupa esai ringan, ulasan apresiatif, resensi, makalah ilmiah, dan sebagainya, akan berada pada wilayah masing-masing dengan sasaran pembaca yang juga berbeda-beda.

Hanya saja, ada beberapa fenomena yang menggelisahkan bahwa kehidupan kritik sastra telah di ambang kepunahan. Tentu saja kenyataan tersebut tidak membuat masyarakat sastra menyerah tanpa upaya. Sebagai masyarakat yang peduli akan tumbuh-kembang kesastraan di tanah air ini, kita wajib mencari jalan keluar bagi persoalan yang dihadapi.

## **PENUTUP**

Keberadaan kritik sastra sangat penting dalam menghasilkan karya sastra yang apik. Ketiadaan kritik sastra berpotensi menyebabkan karya sastra kehilangan arah. Tanpa kritik sastra, para sastrawan akan memproklamasikan dirinya sebagai bagian dari perayaan kebebasan yang menggurita dalam media.

Tugas kritikus tidak hanya semata-mata menghakimi bahwa sebuah karya bernilai baik atau tidak, merekomendasi karya sastra itu layak dibaca atau tidak, atau bahkan mempromosikan pengarang jagoannya lebih unggul dari yang lain. Akan tetapi, kritikus memiliki tugas yang lebih penting, yakni memberikan apresiasi yang kritis.

Pada dasarnya, kritik sastra tidak hanya berada dalam wilayah akademis yang hanya boleh dikerjakan oleh kaum akademikus. Akan tetapi, kritik sastra adalah milik publik. Dalam hal ini, terdapat dua jenis kritik sastra dengan media dan sasaran yang berbeda. Pertama, kritik sastra akademis, yang wilayahnya berada dalam dunia akademis. Kritik sastra akademis ini memiliki kerangka teoretis dan metode ilmiah yang mutlak disertakan dalam landasan argumen. Kedua, kritik sastra umum, yang sasarannya adalah publik, masyarakat dari berbagai kalangan



dengan latar belakang pendidikan yang beraneka ragam. Media yang digunakan dapat berupa apa saja, seperti majalah, surat kabar, buletin, dan sebagainya. Meskipun dalam kritik sastra umum mungkin juga digunakan metode ilmiah dengan kerangka teoretis, mengingat sasarannya adalah masyarakat umum, penekanan jenis kritik ini bisa saja sekadar apresiasi.

Dengan demikian, masyarakat yang peduli sastra tidak boleh pasrah dengan fenomena yang menggelisahkan akan kelangsungan hidup kritik sastra di era globalisasi ini. Para kritikus harus jeli menyikapinya menjadi tantangan untuk menciptakan peluang eksistensi kritik sastra tersebut ke arah yang lebih baik.

Dalam hal ini, multimedia adalah sebuah peluang menjawab tantangan, bukanlah penghalang bagi lahirnya kritik sastra yang (bahkan) lebih berkualitas. Peluang tersebut dapat berupa pemanfaatan blog atau laman mini bagi kritik sastra umum dan pemanfaatan jurnal elektronik bagi kritik sastra akademis.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, N. (2015). "Kelangkaan Kritikus dan Peneliti Sastra." In D. Ahmad, W. Samry, & Y. Azrial (Eds.), *Dari Kemilau Masa Lampau* (hlm. 115—118). Padang: Palagan Press.
- Amin, M. (2007). "Hantu Itu Bernama Kritik." In H. B. Kori'un (Ed.), *Krisis Sastra Riau* (hlm. 65—74). Pekanbaru: Yayasan Sagang.
- Awaludien, M. I. (2016). "Menimbang Kembali Kematian (Kritik) Sastra!" Retrieved October 12, 2017, from [https://www.kompasiana.com/miqbalawal/menimbang-kembali-kematian-kritik-sastra\\_56bc014d337b6108059b2df5](https://www.kompasiana.com/miqbalawal/menimbang-kembali-kematian-kritik-sastra_56bc014d337b6108059b2df5)
- Damono, S. D. (1993). *Novel Jawa Tahun 1950-an: Telaah Fungsi, Isi, dan Struktur*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Endraswara, S. (2013). *Teori Kritik Sastra: Prinsip, Falsafah, dan Penerapan*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Hardiningtyas, P. R. (2017). "Di Tengah Kondisi 'Krisis' Kritik: Menelusuri Budaya Kritik dan Kritik Sastra Terkini." In *Kritik Sastra yang Memotivasi dan Menginspirasi* (hlm. 18—24). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bekerja sama dengan Dewan Kesenian Jakarta.
- Hidayat, A. (2017). "Kritik Sastra Indonesia Menuju Analisis Kritis." In *Kritik Sastra yang Memotivasi dan Menginspirasi* (hlm. 10—17). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bekerja sama dengan Dewan Kesenian Jakarta.
- Kori'un, H. B. (2007). "Kritikus Sastra Riau, di Mana Persembunyianmu?" In H. B. Kori'un (Ed.), *Krisis Sastra Riau* (hlm. 57—64). Pekanbaru: Yayasan Sagang.
- Lukman, Atmaja, T. D., & Hidayat, D. S. (2017). *Manajemen Penerbitan Jurnal Elektronik*. Jakarta: LIPI Press.
- Mahayana, M. S. (2015). *Kitab Kritik Sastra*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Maman, M. S. (2007). *Ekstrinsikalitas Sastra Indonesia*. Jakarta: Grafindo.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Santosa, P. (1999, November). "Kritik Sastra Tidak Hanya Sekadar Menghakimi Baik dan Buruk." *Berita Buana*.
- Support Scientific Communities. (2017). "Open Journal System (OJS)." Retrieved



- October 12, 2017, from <http://itahardianty.blogspot.co.id/2013/01/open-journal-system-ojs.html>
- Suryajaya, M. (2017). "Tantangan dan Masa Depan Kritik Sastra Indonesia: Berakhirnya Era Polemik Besar Sastra Indonesia." Retrieved October 12, 2017, from <https://lokomoteks.com/tantangan-dan-masa-depan-kritik-sastra-indonesia/>
- Suwondo, T. (2007). *Esai/Kritik Sastra dalam Minggu Pagi, Masa Kini, dan Semangat*. (E. Marantika, Ed.). Yogyakarta: Gama Media.
- Wellek, R., & Warren, A. (1976). *Theory of Literature*. Widdlessex: Penyn Books Ltd.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 1 Kelompok 5**

Pembicara : Dessy Wahyuni  
Judul Makalah : “Multimedia Kritik Sastra”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 08.00—09.35  
Moderator : Dr. Ganjar Harimansyah  
Pencatat : 1. Miranti Sudarmaji  
2. Mukhamdanah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Karya sastra dapat dijadikan media berimajinasi bagi sastrawan dalam menanggapi perkembangan sosial, politik, spiritual, dan sebagainya dalam menghasilkan sebuah karya yang inovatif dan bernilai.
2. Penulis karya sastra bermunculan dari berbagai penjurur, tetapi tidak diikuti oleh maraknya apresiator/kritikus sastra.
3. Kritik sastra, antara lain, berfungsi untuk (1) meningkatkan bobot sebuah karya sastra; (2) menghindarkan agar karya sastra yang dihasilkan tidak menyimpang (yang dapat membahayakan eksistensi pengarang); dan (3) membantu pembaca agar mengerti maksud pengarang yang dituangkan lewat karya sastra.
4. Jenis kritik sastra dapat dibedakan atas kritik sastra ilmiah (kritik sastra akademis) dan kritik sastra umum.
5. Melalui media-media sosial, seperti Twitter, WhatsApp, dan Facebook, masyarakat khawatir muncul kritik yang tidak beraturan dengan diksi yang liar. Ini merupakan tantangan. Bagaimana caranya? Kritikus dapat menuangkan kritiknya melalui blog dengan isu terkini.
6. Kritik sastra dapat dilakukan melalui jurnal elektronik, dengan mutu terukur karena melalui proses yang panjang.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Sarifudin Lubis  
Instansi : SMAN I Binjai, Sumatra Utara

**Pertanyaan:**

Apa yg disebut sastra liar? Bukannya sastra itu sendiri liar?

**Jawaban:**

Sastra disebut liar karena sastra itu multitafsir. Siapa pun boleh menafsirkan karya sastra. Ada karya sastra yang membolak-balikkan tafsiran pembaca. Di sinilah fungsi kritikus sastra.

**Penanya 2**

Nama : Yohanis Randy  
Instansi : Universitas Flores, Nusa Tenggara Timur



**Pertanyaan:**

1. Dapatkah pengelompokan jenis kritik sastra tidak hanya seperti sekarang ini? Pengelompokan jenis kritik sastra seperti ini disebabkan dahulu belum muncul era digital. Dalam upaya melakukan penggolongan, media apa yang digunakan untuk publikasi kritik sastra? Siapakah pembaca kritik sastra tersebut? Dosen selama ini sudah menulis kritik sastra dalam jurnal, buku, dan media *online*.
2. Tolong bedakan antara kritik sastra dan esai sastra.

**Jawaban:**

1. Esai yang singkat dapat dibuat kritik sastra.
2. Kritik sastra ialah semacam esai, dengan kata-kata yang sedikit, tetapi harus ada unsur kritik. Keberhasilan atau keabsahan kritik sastra tidak bergantung pada siapa yang membuat atau menulis kritik, tetapi bergantung pada kebenarannya.

**Isu-Isu Penting:**

1. Perlu definisi tentang apa yang disebut dengan kritikus sastra akademik dan kritikus sastra nonakademik.
2. Perlu pengelompokan kritik sastra yang dibuat berdasarkan media yang digunakan.
3. Perlu penumbuhan kecintaan siswa terhadap karya sastra dan kritik sastra agar siswa tidak mengalami kesulitan jika diajak berdiskusi atau berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kritik sastra.
4. Mungkin perlu ditetapkan aturan-aturan yang bersifat konvensional agar kritikus atau kritik sastra tidak bersifat liar.
5. Penelitian sastra akademik dan non-akademik mengalami transformasi wajah wahana publikasi yang memberikan ruang bagi keduanya untuk kritik-kritik sastra.
6. Penelitian sastra akademik dengan wahana jurnal, yang oleh pemerintah distandarkan keilmiahannya, menggunakan lembaga pengindeks nasional, dimanfaatkan oleh penulis dan peneliti di bidang sastra khususnya kritik sastra.
7. Perlu dibuat lembaga yang akan menentukan siapa yang dapat disebut kritikus sastra dan siapa yang tidak dapat disebut kritikus sastra.





## 5. Perkembangan Terkini Penelitian Sastra Akademik dan Nonakademik Menghadapi Revolusi Industri 4.0

### PERKEMBANGAN TERKINI PENELITIAN SASTRA AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

*The Latest Outgrowth of Academic Literature Research And Non Academic Literature Research Facing Industrial Revolution 4.0*

**Muhammad Fadli Muslimin**

Universitas Gadjah Mada

fadlimuslimin@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu penelitian ilmiah dan nonilmiah. Perbedaan mendasarnya terletak pada proses mencapai kajian tersebut atau yang biasa disebut sebagai persoalan metodologis yang melibatkan teori dan metode. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi dan data serta untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau pun hipotesis. Sementara itu, penelitian sastra dilakukan untuk mengetahui keakuratan elemen-elemen dalam karya sastra dengan menghubungkannya dengan kerangka metode dan teori yang tepat. Tujuan penelitian pada umumnya ialah untuk mendiseminasikan gagasan atau pun hasil observasi terhadap suatu objek kajian sastra. Penelitian dapat dilakukan oleh akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya. Media untuk penelitian di era digital atau Revolusi Industri 4.0 telah berkembang sehingga mengalami pergeseran paradigma dalam hal diseminasinya. Wahana jurnal yang umumnya digunakan oleh peneliti akademisi dan praktisi sebagai ruang untuk menyebarluaskan hasil penelitiannya bagi khalayak pun telah bergeser dari paradigma cetak ke daring. Penelitian nonilmiah yang dilakukan oleh masyarakat umum atau nonakademis pun menunjukkan pergeseran yang lebih drastis dari sekadar blog kemudian bergerak pada wahana daring populer yang dikelola secara profesional. Wahana penyebarluasan tersebut berada dalam garis Revolusi Industri 4.0 yang berfokus pada pemanfaatan teknologi lebih maju yang lebih kompetitif dan berdaya saing mengantarkan pergeseran paradigma ini makin mendapatkan ruangannya. Penelitian ini bertujuan melihat perkembangan pergeseran wahana diseminasi penelitian sastra akademik dan nonakademik di Revolusi Industri 4.0. Metode yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah diseminasi penelitian sastra akademik dan nonakademik yang menunjukkan pergeseran paradigma yang tidak saja terjadi pada wahana diseminasinya, tetapi juga pada penelitiannya yang lebih bersifat universal.

**Kata-kata kunci:** penelitian, akademik, nonakademik, diseminasi, Revolusi Industri 4.0

#### **Abstract**

*Research conducted by the community in general is divided into two, i.e. scientific and non-scientific research. The basic difference lies in the process of achieving*



*the results of the study or commonly referred to as a methodological problem involving theory and method. Research is an activity carried out by following scientific rules systematically to obtain information and data and to prove the truth or untruth of an assumption or hypothesis. Meanwhile, literary research is conducted to find out the obscurity of the elements in literary works by relating them to the framework of the right methods and theories. The purpose of research in general is to disseminate ideas or results of observation of an object of literary study. Research can be carried out by academics, practitioners, and society in general. Media for research in the digital era or Industrial Revolution 4.0 has evolved to experience a paradigm shift in terms of its dissemination. The journals that are generally used by academic researchers and practitioners as a space to disseminate their research results to the public have also shifted from the print paradigm to online. Non-scientific research conducted by the general public or non-academic shows a more drastic shift than just blogs then moves on popular online rides that are professionally managed. The vehicle for dissemination is in the line of the Industrial Revolution 4.0, which focuses on the use of more advanced and more competitive technologies, this paradigm shift gains more space. This study aims to see the shifting development of vehicles for the dissemination of academic and non-academic literature in Industrial Revolution 4.0. The method used is descriptive research method. The results of this study are the dissemination of academic and non-academic literature research that shows a paradigm shift that has not only occurred in the seminar on dissemination, but also in researchers who are more universal.*

**Keywords:** *scientific, research, dissemination, Industrial Revolution 4.0*

## PENDAHULUAN

Kritik sastra akademik mengemuka pada akhir tahun 1960-an karena dipicu pergulatan yang terjadi antara pengikut golongan Kritik Sastra Ganzheit dengan pengikut golongan sastra akademik yang dikenal sebagai Kritik Sastra Rawamangun. Di antara tokoh Kritik Sastra Ganzheit itu adalah Arief Budiman dan Goenawan Mohamad, sedangkan kritikus aliran Rawamangun, di antaranya, ialah M.S. Hutagalung, J.U. Nasution, M. Saleh Saad, dan Boen Sri Oemarjati (Pradopo, 2012). Edisi panjang pergulatan itu berujung pada dipertemukannya kedua kelompok kritikus dalam berbagai forum, yaitu pada tahun 1978 dalam kegiatan bertajuk “Tentang Kritik Sastra: Sebuah Diskusi” dan pada pertengahan tahun 1970-an dalam polemik antara M.S. Hutagalung dan Arief Budiman yang kemudian dibukukan dengan judul *Kritik atas Kritik atas Kritik* (1975). Selanjutnya, pada akhir tahun 1972 Dewan Kesenian Jakarta juga mengadakan diskusi sastra dengan tema “Perbandingan Metode Kritik Sastra *Ganzheit* dengan Kritik Analitik”. Pada tahun 1980-an gejolak teori sastra dan kritik sastra Barat memasuki babak baru yang lebih kuat masuk ke dalam lingkungan kritik sastra akademik. Pergulatan terjadi dengan hasrat untuk membentuk teori sastra dan kritik sastra sendiri yang khas Indonesia. Kemudian, pada tahun 1988 Subagio Sastowardoyo membuat renungan “Mencari Jejak Teori Sastra Sendiri” yang disampaikan di Universitas Bung Hatta Padang dalam agenda Seminar Susastra Indonesia pada 23—26 Maret. Subagio menawarkan lima prinsip teori yang seharusnya diperhatikan, yaitu bersifat umum, eksplisit, falsifikasi, koherensi, dan sahaja (Suroso, 2015).



Pengikut kedua aliran kritik tersebut bergulat mengenai keilmiahan suatu kritik terhadap karya sastra. Arief Budiman dalam tanggapannya terhadap tulisan S. Effendi (1978) menyatakan bahwa apabila sejumlah teori atau kaidah-kaidah dapat dicek kebenarannya pada cipta sastra apa pun, telaah tentang cipta sastra adalah ilmu. Jika tidak, dia bukan ilmu (hlm. 20). Pandangan tersebut ditegaskan kembali bahwa kritik sastra yang dimaksud oleh Effendi lebih ditekankan pada sarjana sastra, dalam penelitiannya terhadap karya-karya sastra atau pembahasan sastra dalam lingkungan akademis. Pada gilirannya, Arief Budiman (1978) merespons pernyataan Effendi dengan mengatakan bahwa kritik bukanlah penelitian. Kritik ialah pengungkapan kembali pengalaman estetis (hlm. 37). Hal itu bermuara pada kefokusannya aturan baku yang ditetapkan secara ilmiah melalui pedoman-pedoman penulisan yang berasaskan pada metode dan teori yang berlaku. Sementara itu, kritik sastra nonakademik memanfaatkan metode dan teori secara bebas sesuai dengan aliran kepenulisan setiap penulis dan cenderung memanfaatkan bahasa populer sebagai wadahnya.

Kecenderungan tersebut membuka ruang lain untuk ditelaah lebih jauh, yaitu media diseminasi terhadap penelitian melalui kedua perspektif tersebut. Polarisasi yang berkesinambungan mengalami transformasi wajah media yang menaungi eksistensi diseminasi gagasan tersebut di masyarakat. Kritik sastra akademik berada tetap dengan jalur keilmiahan yang diterapkan pada analisis karya sastra, begitu juga kritik sastra nonakademik. Dalam perkembangannya, keduanya menunjukkan wajah baru seiring perkembangan zaman, terutama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi secara luas dalam rangka diseminasi kritik sastra melalui ruang publikasi masing-masing. Kritikus memanfaatkan jurnal untuk memuat kritik sastra akademik dan portal daring populer untuk kritik sastra nonakademik.

Penganut kedua aliran tersebut sejatinya tidak lagi berada dalam tataran perseteruan mengenai siapa yang layak menempati posisi puncak kritik sastra yang relevan bagi masyarakat Indonesia, khususnya akademisi; pegiat; penikmat; dan pecinta sastra, untuk mencerdaskan masyarakat melalui sastra, tetapi telah mengalami pergeseran ke sebuah babak baru, yaitu pertarungan *index* dan *impact factor* bagi pembacanya. Sebagaimana diungkapkan oleh W.H. Hudson, fungsi utama kritik ialah memperjelas dan memberi dorongan (Pradopo, 2007: 18). Artinya, kritik sastra menjadi sebuah wadah untuk mengungkapkan makna yang samar-samar yang dituliskan oleh penulis sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra dapat diejawantahkan dan dikonsumsi oleh pembacanya. Penyandingan kritik sastra dengan karya sastranya menajamkan kepandaian pembaca dalam mencerna isi karya sastra. Hal tersebut dapat diterjemahkan bahwa kritik dapat menunjukkan kekuatannya dalam memengaruhi pembaca untuk mengungkapkan makna dalam karya sastra.

Aliran kritik sastra akademik dan nonakademik pada era kontemporer merujuk pada penelitian-penelitian sastra, baik yang memanfaatkan metodologi ilmiah dalam kajiannya maupun yang tidak memanfaatkannya. Perkembangan selanjutnya pada era Revolusi Industri 4.0 setidaknya menyebabkan gear teknologi saat setiap instansi atau pun institusi bertanggung jawab mewadahi hasil penelitian masyarakat melalui wadah-wadah daring yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas, yaitu jurnal untuk penelitian ilmiah dan portal-portal daring populer untuk penelitian nonilmiah.



Pada era Revolusi Industri 4.0 wahana diseminasi penelitian berbasis ilmiah atau pun nonilmiah telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Perkembangan yang signifikan dan progresif ditunjukkan oleh pergerakan wahana jurnal-jurnal nasional di Indonesia yang memanfaatkan *open journal system* yang dikelola secara ilmiah oleh manajer jurnal yang tentu ahli di bidangnya dan portal-portal daring yang memuat penelitian-penelitian nonilmiah.

Hal itu dapat terlihat dari beberapa indikator yang dapat dijadikan pertimbangan, salah satunya ialah kemampuan wahana diseminasi untuk menjangkau pembacanya dan hal tersebut jika ditinjau dari paradigma lama, bertumpu pada kuantitas wahana yang mampu diperjualbelikan oleh penerbit sehingga dapat menjangkau pembacanya. Sementara itu, indikator lain dapat ditinjau dari jumlah pembaca hasil kritik tersebut secara daring. Bagi penganut kedua aliran kritik sastra tersebut, keberadaan kritik mempunyai dampak kepada pembacanya ditinjau dari wadah pengindeksnya masing-masing dan sejauh mana komunikasi antarpengkritik.

## LANDASAN TEORI

*Impact factor* adalah sebuah alat ukur untuk mengetahui frekuensi rata-rata artikel dalam sebuah jurnal dikutip dalam suatu waktu tertentu. Itu berguna untuk mengukur pentingnya sebuah jurnal dengan mengalkulasi waktu saat artikel-artikel tersebut dikutip. *Impact factor* hanyalah salah satu alat untuk pemerinkatan, pengevaluasian, pengategorian, dan perbandingan jurnal yang disediakan oleh (*JCR*). *Impact factor* berguna untuk memastikan jumlah mutlak frekuensi jurnal. Secara umum, *impact factor* dapat digunakan sebagai alat untuk manajemen koleksi jurnal perpustakaan, terutama bagi pustakawan dan peneliti dalam riset pasar. *Impact factor* menyediakan bukti kuantitatif bagi editor dan penerbit untuk memosisikan jurnal mereka dalam kaitannya dengan kompetisi—terutama jurnal dalam kategori yang sama. Dewasa ini, *Impact factor* banyak digunakan pada proses evaluasi akademik. *Impact factor* digunakan untuk memberikan penghitungan awal mengenai prestise atau derajat jurnal tempat individu memublikasikan tulisannya. Artinya, kualitas sebuah artikel ditentukan oleh *impact factor*-nya, makin tinggi *impact factor* artikel dalam sebuah jurnal melalui pengutipan, makin tinggi pula derajat atau prestise yang didapatkan oleh makalah atau artikel yang termuat di dalamnya (Garfield, 1998).

*Index* atau *journal-index* adalah suatu pengukuran kualitas sebuah jurnal yang dapat dikalkulasikan menggunakan data dari Web of Science, Scopus, atau Google Scholar, dan Sinta. Indeks membantu jurnal memperoleh tujuannya agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Akses yang mudah terhadap jurnal akan berdampak pada reputasi jurnal sebagai sumber informasi berharga dalam bidangnya masing-masing yang dapat diandalkan. Di Indonesia jurnal perlu didaftarkan kepada lembaga pengindeks nasional atau pun internasional agar indeks dan *impact factor*-nya dapat terlihat nyata.

*Impact Factor* dan *index*, jika diterjemahkan secara nonakademik, berarti dampak dari sebuah artikel bagi penulis lain yang melakukan sebuah pembacaan, kemudian mengutip artikel tersebut untuk keperluan publikasi lainnya. *Index* adalah wadah bagi tulisan-tulisan nonakademik untuk mendapatkan pengakuan nasional dan internasional agar dapat berkontestasi dalam sebuah publikasi populer yang menggunakan portal-portal dalam jaringan ('daring' *online*). Portal-



portal ini memiliki kedudukan yang setara dengan jurnal, dalam arti merupakan wadah bagi kritik sastra akademik dan nonakademik sebagai ruang publikasi. Tulisan-tulisan nonakademik yang memuat kritik-kritik sastra dijadikan tinjauan dalam melihat perkembangan budaya kritik sastra di Indonesia di dalam portal daring ini. *Impact factor* menjadi sebuah indikator dasar untuk melihat kemajuan kritik sastra melalui kunjungan pembaca secara daring untuk menikmati kritik-kritik sastra tersebut. Sementara itu, *index* merupakan ruang bagi penulis kritik sastra nonakademik menempatkan tulisan-tulisannya supaya terindeks sehingga mempunyai reputasi, baik secara nasional maupun internasional, dan mendapatkan pengakuan. Akan tetapi, sejauh ini belum ditemukan platform pengindeks portal daring sebagaimana yang diterapkan pada jurnal-jurnal berkala ilmiah yang mempunyai platform indeks seperti di Scopus, Elsevier, Ebsco, Proquest, IPI, dan Sinta.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada pengungkapan kondisi penelitian sastra akademik dan nonakademik yang dilakukan oleh masyarakat. Data yang dikumpulkan melalui telaah terhadap beberapa penelitian itu menekankan pada perkembangan kedua tradisi penelitian tersebut. Selanjutnya, penulis mendekati fenomena tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi pada era revolusi industri yang memiliki kecenderungan berupa pergeseran paradigma diseminasi penyebaran penelitian tersebut. Data selanjutnya dianalisis dengan mempertimbangkan tujuan *impact factor* dan *index*, tetapi tanpa analisis lebih jauh terhadap penghitungan kutipan terhadap karya-karya tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Diseminasi Penelitian Sastra Akademik dan Nonakademik**

Sejarah mengungkapkan bahwa kritik sastra Indonesia modern mengalami transformasi wajah. Menurut Pradopo (2012), kritik sastra Indonesia modern awalnya ditulis oleh para sastrawan sejak periode Balai Pustaka sampai dengan periode Angkatan '45. Setelah itu, pada pertengahan tahun 1950-an wajah baru ditunjukkan oleh kalangan akademik di lingkungan universitas melalui penulisan kritiknya yang dikenal juga dengan kritik akademik. Para sastrawan tetap menuliskan kritik terhadap karya sastra. Meskipun demikian, antara tahun 1956 sampai dengan 1988 penelitian kritik sastra akademik tetap dominan.

Kritik sastra akademik yang dipelopori oleh M.S. Hutagalung, J.U. Nasution, M. Saleh Saad, dan Boen Sri Oemarjati hadir pada awal tahun 1960-an hingga pertengahan tahun 1988. Respons positif terhadap arus teori sastra dan kritik sastra Barat yang masuk ke Indonesia di lingkungan akademik tampak pada penyelenggaraan Seminar Sastra di Universitas Bung Hatta. Klaim terhadap kritik sastra akademik sebagai wujud kesewenang-wenangan akademisi menjadi perdebatan di kalangan sastrawan yang pada saat itu karya sastra dianggap sebagai jasad takberjiwa, kritikus dianggap melakukan pembedahan atas jasad tersebut dengan memenggal bagian-bagian karya sastra dan akibatnya tugas kritik akademis seolah-olah hanya melakukan pencabikan atas sebuah teks sastra (Mahayana, 2009). Anggapan tersebut dapat dikatakan tepat jika melihat bagaimana akademisi mengkritik sebuah karya dengan berfokus hanya pada



sebuah objek formal tertentu sehingga hasil kritik berupa fragmen-fragmen menyisakan ruang untuk dikaji oleh akademisi lainnya.

Akademisi memperlakukan karya sastra sebagaimana jasad yang dibedah secara parsial karena diteliti bagian-bagian tertentu saja dan tidak menyeluruh. Tirto Suwondo (2010) mengungkapkan bahwa para kritikus akademis membedah karya sastra secara parsial dan tidak menyeluruh dengan mengupas seluruh isi dalam sebuah novel yang dikritiknya. Ia memberikan contoh sebagai berikut. Sariyati Nadjamuddin Tome meneliti novel *La Barka* karya Nh. Dini dari perspektif feminisnya saja, sedangkan Putera Manuba mengupas novel-novel Pramoedya Ananta Toer dalam tulisan “Novel-novel Pramoedya Ananta Toer: Refleksi Pendegradasian dan Interpretasi Makna Perjuangan Martabat Manusia”. Meskipun demikian, tujuan dari pembedahan yang tidak menyeluruh tersebut ialah untuk membangun orientasi tersendiri terhadap penelitian yang dilakukan terhadap sebuah karya. Kritik utama yang hendak disampaikan adalah bagaimana sebuah kritik terfokus pada hal-hal tertentu di dalam dan di luar karya dengan memanfaatkan pendekatan tertentu sehingga tidak menjangkau semua aspek karena objek yang hendak dikritik dalam karya sastra memiliki banyak dimensi, aspek, dan unsur.

Lingkup kritik sastra akademik tidak saja terbatas pada tulisan ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi sastra, atau pun tugas-tugas akademik sastra lain yang menggunakan kritik sastra sebagai studi utamanya, tetapi juga telah merambah ke arah yang lebih luas, yaitu wahana daring berupa jurnal-jurnal yang dikelola secara ilmiah. Jurnal nasional dimanfaatkan sebagai ruang akademik ilmiah untuk memublikasikan tulisan ilmiah, dalam hal ini kritik sastra, sesuai dengan kebijakan editorial setiap jurnal tanpa mengabaikan kaidah-kaidah keilmiah menurut perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pengembangan, atau profesi ilmiah lain. Hal itu bertujuan untuk meregistrasi kegiatan kecendekiaan, menyertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya.<sup>14</sup> Kecenderungan menggunakan jurnal sebagai pangkalan data publikasi bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia sastra akademik di Indonesia. Tercatat pada tahun 1989 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, melahirkan Jurnal *Humaniora*; pada tahun 1999 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, menerbitkan *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*; pada tahun 2002 Jurusan Sastra dan Bahasa Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menerbitkan *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra*; pada tahun 2005 Fakultas Humaniora, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, menerbitkan Jurnal *Lingua*.

Tokoh kritik sastra nonakademik, Arief Budiman, merespons golongan kritikus sastra akademis kelompok Rawamangun dengan mengemukakan sebuah metode *Ganzheit* yang menekankan pendekatan subjektif, tanpa prasangka, dan pengahayatan terhadap karya seni sebagai suatu keutuhan, baik bagi pembaca maupun kritikus (Teeuw, 1989). Metode ini diterapkan langsung olehnya dalam skripsi yang ditulisnya di bidang psikologi di Universitas Indonesia pada tahun

---

<sup>14</sup>Permen No 22 Tahun 2011 tentang Terbitan berkala ilmiah



1971 dan diterbitkan ulang pada tahun 1976 dengan judul “Chairil Anwar, Sebuah Pertemuan”.

Kritik sastra nonakademik memanfaatkan media, seperti koran, majalah, buletin, dan buku sebagai sarana publikasi perluasan gagasan mengenai kritik sastra sehingga dapat dikonsumsi oleh pembacanya. Meskipun demikian, dalam perkembangannya kritik sastra nonakademik bermain dalam ruang populer dengan pembaca tersendiri yang tidak saja dinikmati oleh kalangan akademis, tetapi juga di luar kalangan itu, yaitu masyarakat umum. Ruang sastra pada tahun 1970-an meliputi surat kabar *Sinar Harapan*, *Pikiran Rakyat*, *Suara Karya* dan *Kompas*; majalah sastra *Horison*, *Budaya Jaya*, dan media cetak lain. Perkembangan media publikasi kritik sastra nonakademik makin meluas dan makin efektif menjangkau pembacanya seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Jangkauan publikasi kritik-kritik nonakademik tidak saja memanfaatkan wahana koran, majalah, buletin cetak, tetapi juga portal-portal daring. Hal itu tidak terlepas dari pergeseran pemanfaatan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 yang menstimulus pergeseran wahana cetak ke wahana daring. Portal yang dimaksud sebagai contoh meliputi [www.jendelasastra.com](http://www.jendelasastra.com), [www.litera.co.id](http://www.litera.co.id), [www.infosastra.com](http://www.infosastra.com), [www.sastranesia.com](http://www.sastranesia.com), [www.duniasastra.com](http://www.duniasastra.com), [www.pawonsastra.com](http://www.pawonsastra.com), dan [www.majelissastra.com](http://www.majelissastra.com), dan lain-lain.

Tidak hanya kritik sastra akademik, tetapi kritik sastra nonakademik pun mengalami perkembangan wahana, yang awalnya memanfaatkan media cetak, kemudian beralih ke wahana daring. Pertanyaan selanjutnya yang mengemuka adalah apakah kritik sastra melalui wahana baru tersebut dapat terfasilitasi? Adakah ruang-ruang bagi kritik sastra sehingga dapat dinikmati gagasan-gagasannya, baik melalui jurnal maupun portal-portal daring?

## 2. Wahana Diseminasi Penelitian Sastra di Era Revolusi Industri

Kementerian Industri Republik Indonesia dalam sebuah Seminar Nasional Outlook Industry 2018 bertema “Bringing the Fourth Industrial Revolution to Indonesia” pada 11 Desember 2017 memaparkan mengenai Indonesia yang telah memasuki babak baru Revolusi Industri yang keempat. Revolusi Industri 1.0 pada akhir abad ke-18 berfokus pada fasilitas produksi mekanik menggunakan air dan kekuatan mesin uap. Revolusi Industri 2.0, awal abad ke-19, memperkenalkan mesin produksi massal yang berdasar pada tenaga kerja. Revolusi Industri 3.0 pada awal abad ke-20 adalah era penggunaan alat-alat elektronik dan teknologi informasi untuk melakukan produksi lebih lanjut. Revolusi Industri 4.0 pada abad ke-21 menekankan konektivitas orang-orang dan mesin-mesin dengan koneksi internet di mana-mana. Revolusi Industri 4.0 menekankan pada lima kunci teknologi utama yang berkembang pesat, yaitu *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, *Advanced Robotics*, *Wearables/Augmented Reality/Virtual Reality*, dan *3D Printing*.

*Internet of Things (IoT)* adalah sebuah sistem yang menggambarkan dunia fisik yang terhubung melalui internet melalui jaringan, baik kabel maupun nirkabel (*An Introduction to The Internet of Things (IoT)*, 2013). Itu berarti, wahana diseminasi penelitian sastra telah memasuki era digital yang proses pengelolaannya menuntut pemahaman teknologi informasi sekaligus pemahaman yang memadai untuk mengolah hasil penelitian secara daring. Oleh karena itu,



pemerintah merespons cepat dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah, dilanjutkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. Berkala Ilmiah yang semula tercetak beralih ke bentuk elektronik menggunakan wahana *Open Jurnal System* atau yang setara untuk memproses tulisan secara cepat dan dapat disunting, ditelaah, dan diterbitkan dengan tetap mengacu pada standar ilmiah. Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah Bab 2 Pasal 1 No 1 merumuskan Jurnal Ilmiah sebagai bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

### 3. Direktori Kritik Sastra Akademis dan Nonakademis

Budaya publikasi ilmiah melalui jurnal-jurnal akademik telah memasuki tahap sistematis dan terstruktur. Para akademisi, peneliti, dan pegiat yang hendak memublikasikan hasil temuannya harus mengikuti aturan atau pun pedoman baku yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 yang mewajibkan penulis berafiliasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangannya, organisasi profesi, atau industri. Artikel yang dimaksud adalah artikel yang secara nyata memajukan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada hasil penelitian dan telaah yang mengandung temuan dan/atau pemikiran orisinal serta bebas plagiarisme.

Beranjak dari hal tersebut, secara umum artikel ilmiah yang dimuat dalam publikasi akademis haruslah mengacu pada pedoman-pedoman keilmiahaan sehingga dapat memberikan dampak nyata dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni, khususnya sastra, dalam hal ini kritik sastra. Untuk mewedahi publikasi yang memberi legalitas kepada para penulisnya tersebut keberadaan jurnal ilmiah menjadi pilihan yang tidak terhindarkan karena regulasi telah ditetapkan secara langsung oleh pemerintah dan wajib ditaati kalangan akademik.

Jurnal-jurnal bidang sastra menjadi wahana akademis untuk publikasi hasil telaah sastra. Di Indonesia terdapat beberapa jurnal-jurnal bereputasi yang menjadi wahana publikasi, antara lain, meliputi Jurnal *Humaniora*, FIB UGM; *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, FIB UI; *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra*, Jurusan Sastra dan Bahasa Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; dan Jurnal *Lingua*, Fakultas Humaniora, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Melalui publikasi jurnal itu, kajian-kajian sastra menjadi hidup di kalangan akademis dan pembaca secara umum. Namun, pertanyaannya ialah apakah ruang tersebut dimanfaatkan oleh para akademisi untuk memperkaya khazanah kritik sastra. Penelusuran kata kunci “kritik sastra” melalui <http://id.portalgaruda.org> menunjukkan terdapat 42 artikel seputar kritik sastra yang dimuat di Jurnal *Humaniora*, Jurnal *IBDA*, Jurnal *SulukIndo*, Jurnal *Barada*, Jurnal *Bahasa dan Sastra*, Jurnal *Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia*, Jurnal *Lingua*, *Bahtera Sastra: Antologi Bahasa dan Sastra Indonesia*, Jurnal *Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Jurnal *Mahasiswa FIB*, *Palasteran*, *Parafrase*, *Kreatif*, Jurnal *Ilmu*





*Sosial dan Humaniora, Jurnal Sosioteknologi, Bahastra Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra, Jurnal Pujangga, Jurnal Kajian Bali, Atavisme Jurnal Ilmiah Sastra, Edu Lingua, Jurnal Pendidikan, Diksi, Sawo Manila, Poetika, Jurnal Humanika, Dialektika.* Kombinasi kata yang berbeda dapat memunculkan hasil yang berbeda.

Artikel kritik sastra tertua yang dimuat dalam jurnal pada tahun 1993 ialah “Kritik Sastra: Sebuah Tinjauan Umum” yang ditulis oleh Suminto A. Sayuti. Sementara itu, artikel kritik sastra terbaru ialah artikel yang ditulis oleh Asep Anugerah dengan judul “Mitos Kecantikan dalam Cerpen Barbitch dan Lipstik Merah Tua Karya Sagita Suryoputri (Telaah Kritik Sastra Feminisme)” dan diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP UHO pada tahun 2015. Kehadiran jurnal-jurnal beserta artikelnya tersebut ditinjau secara historis dan kuantitas dapat dikatakan belum dikerjakan oleh kalangan akademis secara bertahap dengan baik dan rutin. Padahal, aktivitas di perguruan tinggi sejatinya memberikan ruang lebih lebar untuk menghadirkan kritik-kritik sastra secara berkesinambungan.

Meskipun kritik sastra nonakademik tidak mempunyai sistem pengindeks sebagaimana jurnal yang didukung oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pengindeks nasional secara daring, kehadiran portal-portal daring dan jurnal nonakademis dapat menjadi ruang efektif dan mempunyai pembaca tersendiri, baik dari kalangan akademis maupun nonakademis. Portal-portal daring secara spesifik menyediakan informasi yang dapat diakses di berbagai perangkat elektronik dengan menyediakan ruang diseminasi gagasan-gagasan mengenai sastra, khususnya kritik sastra. Situs-situs web demikian dibangun dan didesain berdasarkan kesamaan selera kolektif suatu jejaring masyarakat dan berbagai fasilitas yang digunakan untuk memenuhi minat dan kebutuhan pembacanya.

Portal-portal daring yang terutama mengusung tema sastra menyediakan banyak ruang bagi penulis atau pun kritikus yang hendak mendiseminasikan karyanya baik berupa berita kesastraan, karya sastra berbentuk drama; prosa; dan puisi; karya sastra klasik, artikel, pokok dan tokoh, esai, kritik, resensi, maupun kamus sastra.

Situs [www.jendelastra.com](http://www.jendelastra.com) pertama kali muncul pada Juni 2009 dengan pimpinan redaksi Ombi Ramli. Ini adalah salah satu portal daring yang memberi ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyalurkan sekaligus menambah wawasan kesastraan Indonesia dan mengekspresikan gagasan, baik dalam bentuk karya sastra, kritik, maupun esai. Pengunjung juga dapat berdiskusi, memberikan komentar, dan saling berbagi informasi dengan pengunjung lain.

*Litera.co.id* dilahirkan oleh Lembaga Literasi Indonesia pada April 2016 dengan dewan redaksi yang terdiri atas Ahmad Yosi Herfanda, Maman S. Mahayana, Mustafa Ismail, dan Sihar Ramses Simatupang. Di dalamnya terdapat beberapa ruang aspirasi, yaitu puisi, puisi pilihan, cerpen, cerpen pilihan, esai sosok, sajak, dan peristiwa.

*Pawonsastra.com* diterbitkan pertama kali pada Januari 2007 dalam bentuk buletin. Pawon Sastra yang didirikan dan didukung oleh sejumlah komunitas sastra di Solo, dalam perkembangannya, tidak hanya menerbitkan karya sastra, tetapi juga mengadakan diskusi, kelas menulis, lokakarya penulisan, serta pentas seni dan sastra dan memperkenalkan portal daring. Dewan redaksinya, antara lain, ialah Yudhi Herbibowo, Bandung Mawardi, Indah Darmastuti, Puitri Hati Ningsih, Yunanto Sutyastomo, dan Fany Chitmah. Pawon sastra memberikan



ruang aspirasi berupa biografi, buletin, cerpen, *e-book*, esai, film, kisah, buku, kolom akhir, puisi, repertoar, video, hasil wawancara, dan informasi kesastraan lain.

Portal kesastraan yang berkembang dan tumbuh di Indonesia sebagai ruang nonakademis bagi penulis untuk menuangkan aspirasi sebenarnya bukan hanya ketiga portal tersebut. Namun, masih banyak portal lain dengan aspirasi serupa yang dikelola secara profesional serta mempunyai struktur lengkap, baik yang bernaung di bawah lembaga-lembaga tertentu maupun yang sifatnya independen, di antaranya, ialah *sembahyangrumputan.com*, *majelissastra.com*, *kalaliterasi.com*, *haripuisi.com*, *titiknol.com*, *floressastra.com*, *mediasastra.com*.

Portal-portal daring itu menyajikan telaah-telaah sastra terbaru dan kontekstual, Portal *jendelasastra.com*, misalnya, memublikasikan tulisan Rendy Ferdiansah, “Kritik Sastra Strukturalisme”—meskipun terlihat tulisan tersebut lebih dekat pada tulisan akademis daripada kritik sastra nonakademis. Ada pula tulisan Fahrudin Nasrullah “Esais, Tukang Cerita, Hingga Kritik Sastra” yang tampak hanya sebagai pemaparan umum mengenai esai hingga kritik sastra. Selanjutnya, ada Baban Banita dengan artikel “Menelusuri Akar Kematian Kritik Sastra Indonesia dalam Matinya Dunia Sastra: Biografi Pemikiran dan Catatan Karya Sastra Indonesia Karya Acep Iwan Saidi”. Dalam tulisan tersebut diulas buku yang ditulis oleh Acep Iwan Saidi.

#### 4. *Index dan Impact Faktor*

Dengan Indeks-h (bahasa Inggris: *h-index*) kritikus mencoba mengukur, baik produktivitas maupun dampak dari karya yang diterbitkan seorang ilmuwan atau sarjana. Indeks tersebut didasarkan pada jumlah karya ilmiah yang dihasilkan dan jumlah sitasi (kutipan) yang diterima dari publikasi lain. Dengan kata lain, indeks adalah sebuah alat yang dimanfaatkan secara daring oleh para peneliti atau pustakawan untuk menemukan konten ilmiah. Dengan indeks dapat ditunjukkan apakah produktivitas sebuah publikasi dapat ditinjau dari jumlah karya yang dihasilkan dan kutipan yang telah dimasukkan ke dalam tulisan.

Di Indonesia indeks terhadap jurnal-jurnal dapat diketahui melalui Portal Garuda <http://portalgaruda.org>, Onesearch Perpustakaan <http://onesearch.id/>, Indonesian Citation Index <http://citation.itb.ac.id/citeseerx/index>, Pilnas Ristek <http://pilnas.ristek.go.id/jurnal/>, dan ISJD <http://isjd.pdii.lipi.go.id/>. Artikel dalam jurnal yang terindeks oleh salah satu dari indeks nasional tersebut dapat dikatakan mempunyai reputasi dan menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan sesuai dengan bidang keilmuan. Jika sebuah jurnal atau pun artikel terindeks di pangkalan data yang terkenal, tentu akan meningkatkan aspirasi pembacanya. Jurnal yang terindeks secara langsung ada yang menampilkan keseluruhan data artikel atau judul artikel beserta referensinya saja.

Penelitian sastra akademis yang diterbitkan melalui jurnal-jurnal Indonesia sebagai sebuah bentuk publikasi ilmiah sejatinya telah terindeks di salah satu alat pengindeks nasional tersebut. Artinya, penelitian tersebut telah memperoleh legitimasi dan pengakuan secara nasional melalui sistem yang telah diterapkan oleh pemerintah melalui Perdirjen Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. Setiap jurnal yang telah terdaftar di dalam jurnal yang telah terindeks nasional otomatis artikel-artikel di dalamnya masuk ke dalam pangkalan data pengindeks tersebut.



Kritik Peni Aji yang berjudul “Karya Religius Danarto: Kajian Kritik Sastra Feminis” dalam jurnal *Humaniora* Vol. 15 No. 1 Tahun 2003 dikunjungi dan diunduh sebanyak 888 kali (Adji & Adji, 2012). Jumlah pembaca kritik Siswo Harsono “Ekokritik: Sastra Berwawasan Lingkungan” dalam Jurnal *Kajian Sastra* Vol. 32 No. 1 Tahun 2008 tidak dapat diketahui pasti karena jurnal tersebut tidak menunjukkannya, tetapi dapat diamati melalui kunjungan pembaca ke jurnal, yaitu 5.974 sejak Oktober 2015 (Harsono, 2008). Sistem indeks nasional tersebut mengakibatkan kontribusi artikel-artikel kritik sastra di dunia sastra, khususnya di bidang akademis, dapat diakui secara nasional.

Sementara itu, *impact factor* pada kritik sastra akademis terbatas pada sistem kutipan yang diterapkan pada setiap jurnal terindeks pada pangkalan data *googlescholar.com*. Makin besar jumlah kutipan yang diperoleh sebuah jurnal, makin tinggi pula dampak ilmiah dari artikel tersebut.

Pada kritik sastra nonakademik, negara tidak memberikan ruang karena tidak terdapatnya sistem indeks serupa yang diterapkan oleh negara kepada portal-portal daring yang mengusung topik telaah sastra, khususnya kritik sastra. Ruang tersebut dikelola secara profesional oleh pegiat, aktivis, penikmat sastra, atau pun komunitas-komunitas sastra yang memiliki perhatian lebih terhadap perkembangan dunia sastra. Tinjauan pada *impact factor* melalui statistik jumlah pembaca portal-portal daring tersebut mengantarkan simpulan bahwa keberadaan portal daring sebagai wahana diseminasi kritik sastra berperan lebih luas sehingga menjangkau semua kalangan masyarakat, termasuk kalangan akademis dan sekaligus menjadi pusat informasi kebaruan perkembangan telaah sastra pada umumnya dan kritik sastra pada khususnya.

## PENUTUP

Penelitian sastra akademik dan nonakademik mengalami transformasi wajah wahana publikasi yang memberikan ruang bagi keduanya untuk kritik-kritik sastra. Penelitian sastra akademis dengan wahana jurnal yang oleh pemerintah distandarkan keilmiahannya menggunakan lembaga pengindeks nasional membuat dampak ilmiahnya dapat dimanfaatkan oleh penulis dan peneliti di bidang sastra, khususnya kritik sastra. Sementara itu, wahana bagi kritik sastra nonakademik bergeser dari wahana-wahana cetak ke portal-portal daring yang dikelola secara profesional atau independen oleh pegiat, aktivis, akademisi, dan sastrawan sebagai upaya mendiseminasikan telaah sastra, khususnya penelitian sastra nonakademik agar dapat dikonsumsi secara daring oleh masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, S. E., & Adji, S. E. P. (2012). “Karya Religius Danarto: Kajian Kritik Sastra Feminis”. *Humaniora*, 15(1), 23–38. <https://doi.org/10.22146/jh.v15i1.771>.
- Budiman, A. (1978). “Jawaban terhadap Bandingan”. in A. lukman (Ed.), *Tentang Kritik Sastra: Sebuah Diskusi* (1st ed., pp. 37–39). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Effendi, S. (1978). “Tentang Kritik Sastra: Sebuah Pendirian Lagi”. In L. Ali (Ed.), *Tentang Kritik Sastra: Sebuah Diskusi* (1st ed., pp. 13–27). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.



- Garfield, E. (1998). *The use of journal impact factors and citation analysis for evaluation of science*. Philadelphia: The Scientist. Retrieved from [http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/eval\\_of\\_science\\_CBE\(Utah\).html](http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/eval_of_science_CBE(Utah).html)
- Harsono, S. (2008). “Ekokritik: Kritik Sastra Berwawasan Lingkungan”. *Kajian Sastra*, 32(1), 31–50. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/kajiansastra/article/view/2702/2607>
- Lopez Research. (2013). “An Introduction to the Internet of Things (IoT). San Fransisco.
- Mahayana, M. S. (2009). “Tentang Kritik Akademis”. Retrieved May 18, 2018, from <http://sastra-indonesia.com/2009/01/tentang-kritik-akademis/>
- Pradopo, R. D. (2012). *Kritik sastra indonesia modern* (1st ed.). Yogyakarta: Gama Media.
- Suroso. (2015). “Kritik Sastra Pintu yang Terbuka: Memelihara Warisan Sastra Indonesia”. *Bedah Buku: Kitab Kritik Sastra Karya. Maman S Mahayana*. Bogor: Universitas Pakuan Bogor.
- Suwondo, T. (2010). Kritik Sastra Indonesia dalam Jurnal *Humaniora* Tahun 2000-2008. In *Workshop Forum Peneliti di Lingkungan Kemendiknas* (pp. 472–490). Yogyakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Teeuw, A. (1989). *Sastra Indonesia modern II* (I). Bandung: PT Karya Nusantara.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Muhammad Fadli Muslimin  
Judul Makalah : “Perkembangan Terkini Penelitian Sastra Akademik dan Nonakademik Menghadapi Revolusi Industri 4.0”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 08.00—09.35  
Moderator : Dr. Ganjar Harimansyah  
Pencatat : 1. Miranti Sudarmaji  
2. Mukhamdanah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Kritik sastra akademik mengemuka pada akhir tahun 1960-an yang dimulai dengan pergulatan antara pengikut aliran Kritik Sastra Ganzheit dan pengikut aliran sastra akademis yang dikenal sebagai Kritik Sastra Rawamangun.
2. Perkembangan yang signifikan dan progresif ditunjukkan oleh pergerakan wahana jurnal-jurnal nasional di Indonesia dengan memanfaatkan *Open Journal System* yang dikelola secara ilmiah oleh manajer jurnal yang tentunya ahli di bidangnya serta portal-portal daring yang memuat penelitian-penelitian non-ilmiah.
3. Perkembangan media publikasi kritik sastra nonakademik makin meluas dan makin efektif menjangkau pembacanya seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak saja memanfaatkan wahana koran, majalah, dan buletin cetak, tetapi juga menggunakan portal-portal daring.
4. Pemanfaatan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 menstimulus pergeseran wahana cetak ke wahana daring.
5. Pada kritik sastra nonakademik, negara tidak memberikan ruang karena tidak terdapat sistem indeks seperti pada kritik sastra akademik.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Sarifudin Lubis

Instansi : SMAN I Binjai, Sumatra Utara

**Pertanyaan:**

Selama ini, seperti dijelaskan oleh pemakalah, ada dua jenis kritik sastra, yaitu kritik sastra yang akademik dan nonakademik. Ada semacam perang dingin di antara keduanya. Akibatnya adalah masyarakat justru tidak menikmati kritik sastra karena kritikus sibuk dengan dirinya sendiri. Banyak kritik sastra yang disampaikan melalui jurnal dan media lain sementara masyarakat sendiri tidak semua mengetahui tentang jurnal.

**Jawaban:**

Kegelisahan kritik sastra akademik dan nonakademik muncul ketika ada dua kubu yang ingin menyalurkan pemikiran kritisnya melalui ranah akademis dan nonakademis. Ketika berkaitan dengan akademis, orang yang terlibat akan



menggunakan wahana tersebut. Dalam perkembangannya, kemudian digagas sejumlah regulasi untuk mengatur penyelenggaraannya. Sementara itu, ada juga yang ingin lepas dari regulasi itu. Mungkinkah kritik tersebut tersalurkan kepada masyarakat tanpa mengorbankan kewajiban akademis. Itulah yang terjadi selama ini.

Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, bagaimana kita memanfaatkan sebuah media agar dapat menyalurkan sebuah gagasan? Selain persolan akademis dan nonakademis (populer), ada pula soal yang berhubungan dengan sifat media jurnal. Apakah kritik sastra yang ditampilkan di media sosial (media populer) memenuhi sejumlah syarat seperti dalam media akademis, misalnya jurnal?

Kritik nonakademis yang banyak muncul di media sosial seakan-akan menunjukkan bahwa kualitas karya sastra menurun. Hal itu dapat diatasi, misalnya, dengan cara mengumpulkan tulisan-tulisan yang terdapat atau termuat di media cetak dan blog-blog. Tulisan-tulisan tersebut dapat dihimpun atau disunting oleh editor yang bagus.

### **Penanya 2**

Nama : Ramis Raut

Instansi : Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara

### **Pertanyaan:**

Kritik sastra akademik dan nonakademik itu yang seperti apa? Apakah orang-orang yang tidak bergelut dengan dunia akademis disebut nonakademis?

### **Jawaban:**

Mekanisme kritik sastra akademik diselenggarakan sesuai dengan aturan yang sudah dirumuskan dalam tata kelola jurnal secara nasional. Sementara itu, mekanisme kritik sastra yang nonakademis dikelola secara profesional melalui portal-portal daring.

### **Penanya 3**

Nama : Ani Rahmawati

Instansi : Universitas Negeri Surakarta

### **Pertanyaan:**

Ada dua permasalahan dalam kritik sastra akademik dan nonakademik. Dua permasalahan tersebut tidak dapat disatukan karena keduanya dirasuki prinsip atau ego yang mendarah daging. Mengapa orang Indonesia sangat sulit bersaing dengan penulis dan penerbit dari luar negeri? Karena di luar negeri ada konvensi yang mengharuskan seorang kritikus atau peneliti, baik yang akademik maupun nonakademik, patuh pada konvensi tersebut. Bagaimana memajukan kritikus sastra Indonesia? Dalam menyampaikan kritik kepada masyarakat, penulis kritik atau kritikus harus konvensional. Ini berarti, penyampaiannya jangan hanya asal bicara.



**Jawaban:**

1. Sekarang adalah masa transisi. Dahulu semua serbacetak, sedangkan sekarang serbadaring. Semua hal dapat diakses melalui media daring. Itu adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk memajukan kritik sastra.
2. Keberhasilan atau keabsahan kritik sastra tidak bergantung pada siapa yang membuat atau menulis kritik, tetapi bergantung pada kebenarannya.

**Penanya 4**

Nama : Erlis Nurmujiningsih

Instansi : Badan Bahasa

**Pertanyaan:**

Jika kita membicarakan tentang kritik sastra, tentu saja tidak hanya tentang akademis dan nonakademis. Kritik sastra juga merupakan sebuah karya sastra. Seperti dikatakan tadi, bahwa tidak semua orang dapat menikmatinya. Pada tahun 1950-an penulis kritik sastra bukan hanya berasal dari bidang politik atau hukum, melainkan juga dari media berbagai jenis. Kritik sastra juga merupakan karya sastra. Itu juga yang harus dipikirkan.

**Jawaban:**

Setuju dengan Ibu Erlis bahwa dunia kritik kebanyakan adalah orang yang telah makan, mengunyah, dan memuntahkan kembali. Sesuatu itu seperti yang disampaikan oleh Sayu Kai, tidak dengan pemahaman yang kosong.

**Penanya 5**

Nama : Sayu Kai

Instansi : -

**Tanggapan:**

Ketika berbagai karya sastra dibawa ke Revolusi Industri 4.0, karya sastra itu menjadi milik semua orang. Apakah orang yang membaca kritik sastra adalah kritikus? Tentu tidak. Karena kritikus harus mengetahui atau mempunyai kompetensi dalam ilmu sastra. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat disebut kritikus sastra. Sebagai pembaca atau penikmat, boleh saja. Untuk mendefinisikan siapa itu kritikus sastra, perlu kehati-hatian. Pembaca belum tentu kritikus, tetapi kritikus pasti pembaca. Perlu definisi yang jelas sehingga tidak semua pembaca disebut kritikus, tetapi cukup sebagai pembaca kritik.

**Penanya 6**

Nama : Nurmahmudah

Instansi : Guru SMA di Lumajang, Jawa Timur

**Tanggapan:**

Pada awal-awal dikatakan bahwa kritik sastra mati suri. Dalam Kurikulum 2013 ada materi kritik sastra yang cukup sulit dilakukan atau diajarkan karena siswa kurang menyukai sastra. Itu menyebabkan siswa mengalami kesulitan jika didekatkan pada hal-hal yang berkaitan dengan sastra. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan hal-hal yang berkaitan dengan kritik atau kritikus sastra, hal itu



bisa dimulai sejak siswa masih duduk di bangku SMA. Ini menjadi PR bagi guru Bahasa dan Sastra Indonesia.

**Isu-Isu Penting:**

1. Perlu adanya pendefinisian yang pasti tentang kritikus sastra akademik dan nonakademik.
2. Perlu adanya pengelompokan kritik sastra yang dibuat berdasarkan media yang digunakan.
3. Perlu adanya penumbuhan kecintaan siswa terhadap karya sastra dan kritik sastra agar siswa tidak mengalami kesulitan jika diajak berdiskusi atau berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kritik sastra.
4. Perlu adanya ketetapan aturan yang bersifat konvensional agar kritik sastra tidak bersifat liar.
5. Penelitian sastra akademis dan nonakademis mengalami transformasi wajah wahana publikasi dari media cetak ke media daring.
6. Penelitian sastra akademis dengan wahana jurnal yang oleh pemerintah distandarkan keilmiahannya menggunakan lembaga pengindeks nasional sehingga dapat dimanfaatkan oleh penulis dan peneliti di bidang sastra, khususnya kritik sastra.
7. Perlu dibuat lembaga yang akan menentukan siapa yang layak disebut kritikus sastra dan siapa yang tidak.





## 6. Penerapan Literasi Digital Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia

### PENERAPAN LITERASI DIGITAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA

*The Application of Digital Literacy based on Local Wisdom in Bahasa Class*

Muhammad Aqmal Nurcahyo<sup>a</sup>, Yunika Afryaningsih<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat

<sup>b</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat

aqmalnurcahyo@unukalbar.ac.id

#### Abstrak

Penelitian ini adalah kajian awal mengenai penerapan literasi digital berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah pemanfaatan teknologi dan penerapan literasi digital berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat minat belajar mahasiswa dan penerapan literasi digital pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pemilihan sampel bertujuan/sengaja. Sampel penelitian adalah mahasiswa semester IV yang sedang mengampu mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra di Kelas Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa telah dapat menguasai lima aspek literasi digital (mengakses, menganalisis dan mengevaluasi, mencipta, merefleksi, dan bertindak) serta mengolah bacaan mengenai kearifan lokal untuk dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pendidik atau peneliti untuk melakukan penelitian serupa yang terkait dengan penerapan literasi digital.

**Kata-kata kunci:** penerapan, literasi digital, kearifan lokal

#### Abstract

*This research is a preliminary study on the application of digital literacy based on local wisdom in Bahasa Class. The problems in this study regarding the use of technology and the application of digital literacy based on local wisdom in Bahasa Class. This study aims to know the interest in learning and student's digital literacy of Elementary Teacher Education Study Program, Teacher Training and Education Faculty, Nahdlatul Ulama University, West Kalimantan. This method used in this research is qualitative approach with analytical descriptive research methods. The sample selection in this research is purposive sample techniques. The research sample is the fourth semester students who are teaching Language and Literature Learning courses in High Class. The results show that students have been able to master 5 aspects of digital literacy (accessing, analyzing and evaluating, creating, reflecting and acting) and processing reading about local wisdom to be able to communicate to others. The results of this research are expected to be useful for educators or researchers to conduct similar research related to the application of digital literacy.*

**Keywords:** application, digital literacy, local wisdom



## PENDAHULUAN

Pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya diberikan pada jenjang pendidikan dasar, tetapi juga di perguruan tinggi. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar karena penguasaan atas bahasa Indonesia dapat dijadikan ukuran nasionalisme seseorang sebagai bangsa Indonesia (Kemendikbud, 2013: i). Oleh sebab itu, Bahasa Indonesia menjadi mata kuliah wajib umum yang diajarkan di semua program studi di perguruan tinggi.

Pesatnya arus globalisasi ternyata berdampak pada kebahasaan seseorang. Masuknya budaya asing menjadikan pemerolehan bahasa seorang anak mengalami peralihan. Hal itu juga dapat disebabkan lingkungan yang didominasi teknologi digital yang serbacanggih.

Fenomena peralihan bahasa ternyata memengaruhi kemampuan membaca dan menulis seseorang (literasi). Literasi dikenal juga sebagai keberaksaraan atau melek aksara. Makna literasi makin mengalami perluasan sehingga tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis dalam konteks kebahasaan dan kesastraan. Ada banyak jenis literasi yang dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman dan bidang ilmu yang dikuasai. Jenis literasi tersebut, antara lain, adalah literasi digital, literasi komputer, literasi informasi, literasi media, literasi statistika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pengertian literasi disesuaikan dengan bidang-bidang ilmu.

Keberhasilan literasi pada dunia pendidikan seperti saat ini dapat dibantu dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Eskicumah mencatat, penggunaan teknologi dalam pendidikan telah memengaruhi struktur sistem pendidikan sehingga teknologi pun dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran (2015: 241). Budaya literasi kini menjadi perhatian utama pemerintah karena berperan dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Lahirnya budaya literasi di Indonesia tentunya juga akan memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan bangsa Indonesia yang berkembang dan maju.

Keberadaan teknologi memberi keuntungan dalam upaya menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa budaya literasi perlu ditingkatkan karena literasi menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki seseorang dalam upaya menghadapi era digital. Literasi digital hadir guna menjawab tantangan perkembangan zaman era 4.0, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Literasi digital berkaitan dengan kecakapan individu dalam menggunakan, mencari, dan mengolah ragam informasi yang diperolehnya melalui gawai (*gadget*). Diutarakan oleh Hermiyanto (2015) bahwa literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi; membangun pengetahuan baru; dan mempermudah komunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Pemahaman akan literasi digital dalam dunia pendidikan seperti pada pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dari suatu daerah. Tidak menutup kemungkinan bahwa globalisasi dan modernisasi akan menggeser budaya lokal dari suatu daerah. Menurut Rahyono



(2009), kearifan lokal adalah kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal adalah hasil kebudayaan yang lahir dari pengalaman sekumpulan masyarakat tertentu yang bertempat tinggal di suatu daerah. Adapun yang termasuk dalam kearifan lokal, antara lain, ialah cerita rakyat, permainan rakyat, adat-istiadat setempat, peribahasa, pantun, dan lagu daerah, serta ritual adat yang dilakukan secara turun-temurun.

Literasi digital berbasis kearifan lokal adalah sebuah inovasi menarik untuk dilatihkan kepada anak generasi sekarang. Pemanfaatan kearifan lokal bernilai positif karena dapat disandingkan dengan literasi digital yang memanfaatkan teknologi. Ini juga bertujuan mengangkat nilai lokal dari suatu daerah dalam pemahaman literasi seseorang. Dengan membudayakan literasi digital berbasis kearifan lokal, seseorang tidak akan melupakan warisan budaya dan akan terus melestarikan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Melalui literasi digital diharapkan generasi muda memiliki bekal dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Berdasarkan paparan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pemanfaatan teknologi pada proses pembelajaran bahasa Indonesia dan (2) bagaimana penerapan literasi digital berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

Di samping itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemanfaatan teknologi dan penerapan literasi digital berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Urgensi penelitian ini adalah mengoptimalkan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan memanfaatkan bantuan teknologi berupa gawai serta melatih mahasiswa agar dapat meningkatkan literasi digitalnya sebagai bentuk persiapan diri dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman era Revolusi Industri 4.0.

## **LANDASAN TEORI**

Bahasa Indonesia menjadi salah satu di antara mata pelajaran wajib, baik bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar maupun bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Pembelajaran Bahasa Indonesia dianggap menjadi begitu penting karena memiliki kontribusi dalam upaya mempertahankan dan menjunjung tinggi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di perguruan tinggi Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib umum. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dalam Pasal 35 disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia untuk program sarjana dan diploma.

Komalasari mencatat, pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pemelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pemelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien (2013: 3). Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan guna meningkatkan kemampuan pemelajar dalam melakukan komunikasi secara lisan dan tulis. Komunikasi lisan dan tulis yang dimaksud adalah kemampuan membaca dan menulis.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harapan masyarakat terhadap kualitas pembelajaran tentunya menjadi lebih baik. Kualitas pendidikan yang baik juga diharapkan muncul melalui proses pembelajaran



Bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kebutuhan menguasai bahasa Indonesia merupakan hal penting bagi semua individu karena kemampuan berbahasa merupakan alat belajar untuk menguasai berbagai mata pelajaran lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan belajar seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa.

Pembelajaran bahasa Indonesia dalam pelaksanaan pendidikan belum menunjukkan performa yang baik. Itu dapat dilihat pada beberapa permasalahan yang ada yang meliputi (1) kurangnya kemampuan pendidik dalam merancang pembelajaran bahasa Indonesia, (2) cara mengajar yang monoton, (3) kurangnya kemampuan dalam pengelolaan kelas, dan (4) buku ajar yang belum memadai. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia lebih didominasi oleh pendidik yang menggunakan metode ceramah, sedangkan peserta didiknya hanya menjadi pendengar. Pembelajaran bahasa Indonesia yang berlangsung juga lebih sering ditekankan pada teori dibandingkan dengan praktik penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Hal itulah yang menjadi salah satu sebab pembelajaran bahasa Indonesia belum mencapai tujuan yang baik agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat berkomunikasi.

Menanggapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia yang berupaya meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, diperlukan sebuah inovasi supaya pembelajaran bahasa Indonesia tidak monoton. Pendidik dapat menerapkan model, strategi, metode, atau pendekatan pembelajaran yang menghadirkan budaya literasi dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Satu di antara banyaknya ragam inovasi yang ada ialah literasi digital.

Pada tahun 2005 literasi digital sudah mulai dikenal. Literasi digital dapat disebut pula sebagai kombinasi dari literasi komputer dan literasi informasi. Literasi digital meliputi seluruh perangkat digital, seperti perangkat keras komputer, perangkat lunak, internet, dan telepon seluler. Marty, dkk. (2013: 3) berpendapat, literasi digital adalah seperangkat kemampuan yang dibutuhkan guna menghadapi kehidupan dan tantangan pada abad ke-21. Selain itu, Ayuni (2015: 1) menyatakan bahwa literasi digital adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai macam sumber digital.

Sejalan dengan permasalahan budaya literasi dalam bahasa Indonesia, literasi digital pun hadir sebagai upaya mempertahankan keberadaan bahasa Indonesia di tengah hadirnya bahasa asing yang masuk ke Indonesia. Melalui pemahaman literasi digital, diharapkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat akan makin baik karena literasi digital diperoleh dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang di masyarakat. Peran literasi digital dalam mempertahankan bahasa Indonesia pun dapat berlangsung dengan baik jika ada perhatian dari pemerintah, pemerhati pendidikan, praktisi pendidikan, dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.

Literasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat dikolaborasikan dengan kearifan lokal yang ada. Tujuannya adalah untuk melestarikan tradisi daerah yang ada agar tidak dimakan zaman di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kearifan lokal pada suatu daerah merupakan unsur kebudayaan setempat yang sangat dijunjung oleh masyarakatnya sebagai suatu ciri khas dan identitas daerah tersebut. Kearifan lokal bangsa Indonesia sangat beraneka ragam karena Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku



bangsa serta bahasa daerah. Kearifan lokal yang menjadi nilai luhur tradisi budaya meliputi, antara lain, cerita rakyat, permainan rakyat, adat-istiadat setempat, peribahasa, pantun, dan lagu daerah, serta ritual adat yang dilakukan secara turun-temurun.

Problematika tentang kearifan lokal sudah seharusnya menjadi perhatian semua elemen masyarakat. Masuknya budaya asing tidak menutup kemungkinan menyebabkan kecintaan pada budaya lokal menjadi berkurang. Indonesia sebagai negara terbuka tentunya dengan senang hati menerima kebudayaan luar yang masuk, tetapi tetap harus dipilah terlebih dahulu, budaya mana yang dapat diadopsi sehingga tidak melupakan unsur kebudayaan lokal yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, generasi muda Indonesia harus dapat menemukan solusi untuk mempertahankan budaya lokal dan penggunaan bahasa Indonesia. Usaha mempelajari dan mengenal ragam kearifan lokal pada era modern ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang diimplementasikan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Memanfaatkan kearifan lokal berarti mengajarkan seseorang agar selalu dekat dengan budaya sendiri. Teknologi yang kian berkembang menyebabkan upaya mengenalkan kearifan lokal dapat menjadi lebih mudah karena kita mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengakses segala informasi mengenai kearifan lokal dari suatu daerah.

Menanamkan nilai kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia merupakan tindakan positif guna membangun kembali nilai-nilai budaya daerah sebagai identitas bangsa Indonesia. Melalui konten kearifan lokal, hal lain yang diharapkan adalah terwujudnya pendidikan karakter pada diri seseorang. Pendidikan karakter dapat terbentuk melalui nilai-nilai kebaikan yang sudah diwarisi dari sebuah sistem budaya daerah. Selain itu, pemanfaatan kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga bertujuan melindungi generasi muda dari pengaruh budaya luar yang kemungkinan besar bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang memanfaatkan teknologi dan kearifan lokal tentunya harus mengikuti aspek-aspek di dalam literasi digital yang akan digunakan. Aspek literasi digital yang dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan literasi digital seseorang mencakup mengakses, menganalisis dan mengevaluasi, mencipta, merefleksi, dan bertindak (Marty, dkk., 2013: 4). Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

1. mengakses, yaitu menggunakan teknologi untuk mengakses informasi;
2. menganalisis dan mengevaluasi, yaitu kemampuan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, dan menyintesis;
3. mencipta, yaitu kemampuan menyusun dan mencipta;
4. merefleksi, yaitu keterkaitan proses berpikir reflektif; dan
5. bertindak, yaitu membagi pengetahuan secara individual dan kolaboratif.

Literasi digital berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga merupakan wujud nyata dari Gerakan Cinta Berbahasa Indonesia (GCBI) yang bertujuan menjaga eksistensi penggunaan bahasa Indonesia pada zaman globalisasi. Dalam pelaksanaan literasi digital berbasis kearifan lokal, peneliti merancang beberapa tahapan pelaksanaan agar tujuan akhir pembelajaran Bahasa Indonesia dapat dicapai dengan maksimal. Berikut adalah tahapan pelaksanaan literasi digital berbasis kearifan lokal yang disesuaikan dengan aspek-aspek di dalam literasi digital.



**Tabel 1**

**Tahapan Pelaksanaan Literasi Digital Berdasarkan Aspek Literasi Digital**

No.	Aspek Literasi Digital	Tahapan Pelaksanaan
1.	Mengakses	Menggunakan perangkat digital berupa laptop atau telepon seluler pintar ( <i>smartphone</i> ) untuk mengakses bacaan tentang kearifan lokal.
2.	Menganalisis dan mengevaluasi Mencipta Merefleksi	Menulis kembali bacaan tentang kearifan lokal.
3.	Bertindak	Membacakan hasil tulisan tentang kearifan lokal.

Sumber: Hobbs 2011 (dalam Marty dkk., 2013: 4)

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002: 9) menyebut penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hal itu sejalan dengan pendapat Sukmadinata (2005) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang, baik secara individual maupun kelompok, yang mengarah pada penyimpulan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis menurut Sugiyono (2009) ialah suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat simpulan yang berlaku untuk umum. Peneliti menggunakan metode tersebut karena menganggapnya cocok untuk mengetahui permasalahan yang ada. Pada penelitian ini, peneliti memusatkan perhatiannya pada permasalahan penggunaan teknologi dan penerapan literasi digital berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hasil penemuan kemudian akan diolah dan dianalisis untuk diambil simpulannya.

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat. Sampel penelitian dipilih melalui teknik pengambilan sampel bertujuan/sengaja (*purposive sampling*). Sugiyono (2009) menyatakan bahwa teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Mahasiswa yang dipilih menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa semester IV yang sedang mengampu mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra di Kelas Tinggi sebanyak 12 orang. Subjek terbilang sedikit karena pada semester IV di Program Studi PGSD hanya terdiri atas satu rombongan belajar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung (observasi) dan dokumentasi. Menurut Hikmat (2011: 73), observasi dapat menjelaskan masalah yang dihadapi secara luas dan perinci



karena data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat, dan perinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia, dan sistem sosial, serta konteks tempat kegiatan itu terjadi. Pada penelitian ini, peneliti akan mengamati langsung pembelajaran bahasa Indonesia dalam kelas dengan menerapkan literasi digital berbasis kearifan lokal melalui bantuan teknologi. Selain itu, Sugiyono (2009) juga mendefinisikan teknik dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk tulisan hasil mengolah informasi tentang kearifan lokal setempat.

Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu beberapa alat untuk mengumpulkan data guna menjawab permasalahan yang muncul. Peneliti menggunakan lembar keterlaksanaan aspek literasi digital untuk melihat aktivitas mahasiswa yang muncul, catatan lapangan untuk menuliskan fenomena-fenomena di dalam kelas, dan kamera untuk merekam peristiwa yang terjadi. Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. **Menyiapkan Rancangan Pembelajaran**  
Peneliti terlebih dahulu merancang kegiatan pembelajaran yang berisi apa yang akan dilakukan supaya dapat terkontrol dan terstruktur sehingga tujuan akhir dari literasi digital berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat tercapai. Rancangan pembelajaran yang dimaksud juga berisi informasi atau bacaan mengenai literasi digital dan kearifan lokal.
2. **Melaksanakan Pembelajaran Bahasa Indonesia**  
Setelah peneliti selesai membuat rancangan pembelajaran, tahap selanjutnya adalah menyampaikan informasi mengenai literasi digital dan kearifan lokal. Kegiatan ini meliputi penyampaian penjelasan perlunya memahami dan mengembangkan literasi digital, pengenalan kearifan lokal daerah setempat, serta penginformasian aspek-aspek yang terkandung dalam penilaian literasi digital.
3. **Melatih Literasi Digital Berbasis Kearifan Lokal**  
Tahap selanjutnya adalah peneliti melatih literasi digital berbasis kearifan lokal dengan menggunakan teknologi atau perangkat digital kepada pemelajar. Perangkat digital yang digunakan pada kegiatan ini berupa laptop dan telepon seluler. Setiap individu diberikan kebebasan mengakses bacaan mengenai kearifan lokal di daerah setempat. Mereka diperkenankan mencari bacaan tentang cerita rakyat, permainan rakyat, adat-istiadat setempat, peribahasa, pantun, lagu daerah, serta ritual adat. Setelah bacaan diperoleh, mereka diminta membaca secara saksama informasi atau bacaan tersebut karena nanti akan diminta menuliskannya kembali.
4. **Menuliskan Kembali Bacaan tentang Kearifan Lokal**  
Setelah selesai membaca bacaan tentang kearifan lokal, setiap individu diminta menuliskan kembali bacaan tersebut dengan bahasa sendiri dan diperkenankan memberikan tambahan ide, simpulan, atau pesan terkait dengan bacaan tersebut.
5. **Membacakan Tulisan tentang Kearifan Lokal**  
Tahap terakhir dalam literasi digital berbasis kearifan lokal adalah pengomunikasian tulisan kepada khalayak ramai. Hal tersebut bertujuan untuk melihat kemampuan membaca individu tersebut dalam menceritakan kembali bacaan tentang kearifan lokal yang telah ditulisnya.



Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Peneliti menceritakan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang muncul ketika pembelajaran berlangsung dengan menggunakan bantuan teknologi dan penerapan literasi digital berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Analisis data yang dilakukan diharapkan dapat menggambarkan secara keseluruhan aktivitas pembelajaran dengan penguasaan literasi digital mahasiswa.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat, sebanyak 12 orang. Penelitian literasi digital berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ini merupakan kajian awal yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti ingin mengetahui seberapa besar minat mahasiswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia jika memanfaatkan bantuan teknologi serta untuk mengetahui penguasaan literasi digital mahasiswa. Perangkat teknologi yang digunakan dalam penelitian ini berupa gawai (*gadget*), yaitu laptop dan telepon pintar (*smartphone*) yang dimiliki oleh setiap mahasiswa.

Berdasarkan temuan di dalam kelas, mahasiswa Program Studi PGSD telah dapat memanfaatkan perangkat teknologi yang mereka miliki untuk mengakses bacaan mengenai kearifan lokal di daerah setempat. Mereka diperkenankan mencari bacaan tentang cerita rakyat, permainan rakyat, adat-istiadat setempat, peribahasa, pantun, lagu daerah, serta ritual adat. Kearifan lokal yang dipilih oleh mahasiswa berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa bacaan yang dipilih, antara lain, ialah "Asal Mula Kota Pontianak", "Perayaan Cap Go Meh di Kota Singkawang", "Asal Mula Pulau Belumbak", "Peringatan Robo-Robo di Kabupaten Mempawah", "Asal Mula Sungai Landak", dan "Gawai Dayak".

Mahasiswa diberikan kesempatan membaca bacaan tersebut dan selanjutnya mereka diminta menuliskan kembali bacaan yang telah dibaca. Pada akhir kegiatan, peneliti meminta mereka menceritakan kembali bacaan tersebut di depan kelas. Setelah itu, terjadi proses tanya-jawab dengan mahasiswa lainnya yang menjadi pendengar.

Peneliti merasa suasana kelas kondusif dan keterlibatan mahasiswa dalam kelas cukup baik. Mereka akhirnya menyadari bahwa laptop dan telepon pintar (*smartphone*) yang mereka miliki ternyata memberikan banyak sekali manfaat dan tentunya dapat mendukung mereka dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia.

## **PENUTUP**

Masuknya budaya asing tidak menutup kemungkinan menyebabkan terjadinya pergeseran budaya, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi kurang dikuasai. Satu di antara upaya yang dapat dilakukan untuk tetap menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah dengan budaya literasi. Literasi digital menjadi satu di antara inovasi untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menulis seseorang melalui penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam meningkatkan literasi digital dapat memanfaatkan kearifan lokal daerah setempat. Hal itu bertujuan untuk menjaga eksistensi budaya lokal agar tidak terlupakan. Literasi digital berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran





bahasa Indonesia sebagai upaya Gerakan Cinta Bahasa Indonesia (GCBI) bertujuan memupuk rasa cinta akan budaya Indonesia dan tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Di samping itu, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dan perguruan tinggi harus berinovasi agar kualitas pendidikan menjadi lebih baik lagi. Pembelajaran bahasa Indonesia seharusnya didominasi praktik menggunakan bahasa yang baik dan benar ketika berkomunikasi (tidak hanya sebatas teori bahasa). Selain itu, peningkatan kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat dilakukan melalui literasi digital berbasis kearifan lokal, yakni pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan teknologi dan memanfaatkan kearifan lokal budaya setempat sebagai bahan informasi atau bacaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayuni, Q.Q. (2015). Literasi Digital Remaja di Kota Surabaya (studi deskriptif tentang tingkat kompetensi literasi digital pada remaja SMP, SMA dan mahasiswa di Kota Surabaya). *Journal Universitas Airlangga*, 4 (2), 224—239.
- Eskicumah, A., *et al.* (2015). Utilization of Information and Communication Technologies as a Predictor of Educational Stress on Secondary School Students. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 14 (2); 241—246.
- Hermiyanto, I. (2015). *Literasi Digital*. Tersedia: [http://www.kompasiana.com/iinhermiyanto/literasi-digital\\_55280e9df17e61ba098b45bc](http://www.kompasiana.com/iinhermiyanto/literasi-digital_55280e9df17e61ba098b45bc). [Diakses pada 7 Januari 2016].
- Hikmat, M.M. (2011). *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kemendikbud. (2013). *Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Komalasari, K. (2013). *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: PT Refika Adiatama.
- Marty, P.F., *et al.* (2013). Scientific Inquiry, Digital Literacy, and Mobile Computing in Informal Learning Environments. *Learning, Media and Technology*, 38 (4), 407—428.
- Moleong, L.J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahyono, F.X. (2009). *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyastra.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Muhammad Aqmal Nurcahyo  
Judul Makalah : “Penerapan Literasi Digital Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 08.00--09.30  
Moderator : Dr. Syarifuddin, M.Hum.  
Pencatat : 1. Elvi Suzanti  
2. Inayatushalihah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Kajian ini bertujuan untuk melihat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan kearifan lokal Kalimantan Barat. Hal itu dilatarbelakangi oleh fenomena generasi muda yang dalam kesehariannya tidak lepas dari gawai.
2. Literasi digital adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Literasi digital disebut juga kombinasi antara literasi komputer dan literasi informasi.
3. Kearifan lokal merupakan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Kearifan lokal ini diharapkan dapat diketahui secara digital.
4. Aspek literasi digital meliputi mengakses, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, merefleksi, dan bertindak.
5. Tahapan pelaksanaan pembelajaran mencakup (1) penyiapan rancangan pembelajaran, (2) pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia, (3) pelatihan literasi digital berbasis kearifan lokal, (4) penulisan kembali bacaan tentang kearifan lokal, dan (5) pembacaan hasil tulisan tentang kearifan lokal.
6. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dapat memanfaatkan teknologi berupa gawai atau telepon pintar. Suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif dan keterlibatan mahasiswa dalam kelas cukup baik.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Maulida

Instansi : IAIN Tulung Agung

**Pertanyaan:**

Apakah sumber belajar berupa kearifan lokal selalu tersedia? Apakah penelitian ini dilakukan dalam sekali pertemuan atau bagaimana?

**Jawaban:**

Untuk di perguruan tinggi, mahasiswa mencari bahan literasi dari laman Balai Pelestarian Sejarah Kalimantan Barat yang memuat tidak hanya kearifan lokal, tetapi juga festival, seperti Cap Gomeh dan Robo-Robo. Namun, ada juga pemelajar yang langsung mencarinya melalui mesin pencarian.



Penelitian ini merupakan penelitian berkala sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan.

**Penanya 2**

Nama : Nurmayani

Instansi : Nusa Tenggara Barat

**Pertanyaan:**

Apakah penelitian ini mempunyai laman yang dapat diakses untuk memperoleh bahan literasi untuk anak sekolah dasar?

**Jawaban:**

Untuk kalangan sekolah dasar, budaya lokal dikenalkan dengan menggunakan buku timbul yang berisi cerita-cerita rakyat Kalimantan Barat.

**Penanya 3**

Nama : Putu Sutrisna

Instansi : STIKES Denpasar

**Pertanyaan:**

Jauh akan lebih bagus jika literasi digital diintegrasikan dengan model pembelajaran *e-learning*.

**Jawaban:**

Pembelajaran elektronik baru saja akan diterapkan di Universitas NU Kalimantan Barat karena universitas ini baru berdiri empat tahun yang lalu.

**Penanya 4**

Nama : Suparman

Instansi : Universitas Palopo

**Pertanyaan:**

Apakah semua tradisi lisan itu kearifan lokal? Festivalnya dalam bentuk cerita atau video?

**Jawaban:**

Saya membuatnya dalam bentuk teks dan meminta mahasiswa mencari di laman-laman yang memuat tentang kearifan lokal di Kalimantan Barat.

**Penanya 5**

Nama : Ambar

Instansi : Universitas Islam Negeri Malang

**Pertanyaan:**

Berbicara tentang kearifan lokal berarti membicarakan jenis kearifan lokal. Jenis kearifan lokal apa yang dipaparkan kepada mahasiswa? Mengapa jenis itu dipilih?



**Jawaban:**

Kearifan lokal sebagian besar berupa cerita rakyat. Cerita-cerita yang diangkat, antara lain, ialah tradisi Robo-Robo di Mempawah, legenda Riam Merasap di Bengkayang, Bubur Pedas, Danau Lait, Asal Nama Bengkayang dan Tradisinya, Pulau Belumbak, Kampong Bali di Kayong Utara, Bukit Bengkawan, Cap Go Meh, Taman Nasional Danau Sentarum, dan Asal-Usul Dayak Selako.

**Isu-Isu Penting:**

1. Perlu dibuat peraturan mengenai kewajiban mengikuti tes UKBI bagi mahasiswa asing yang akan melanjutkan studi di Indonesia.
2. Kebudayaan lokal yang dijadikan materi dalam literasi digital tidak terbatas pada kearifan lokal daerah tertentu, tetapi juga dapat mencakup kearifan lokal daerah lain.
3. Kemajuan teknologi digital dapat digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia dan literasi.



## 7. Keberterimaan dan Kebermanfaatan Serapan Kata Asing dalam Bidang Teknologi Informasi oleh Penutur Indonesia

### KEBERTERIMAAN DAN KEBERMANFAATAN SERAPAN KATA ASING DALAM BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI OLEH PENUTUR INDONESIA

*Acceptance and Usefulness of Foreign Words Absorption in Information Technology by Indonesian Speakers*

**M. Zaim**

Universitas Negeri Padang

mzaim\_unp@yahoo.com; mzaim@fbs.unp.ac.id

#### **Abstrak**

Kemunculan kata serapan bahasa asing dalam teknologi informasi yang ditulis dalam bahasa Indonesia telah memperkaya kosakata bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan dalam komunikasi formal dan informal. Kata serapan diperlukan seiring dengan munculnya kosakata baru bahasa asing mengikuti perkembangan teknologi informasi. Penyerapan kata asing bisa dilakukan melalui adopsi dan adaptasi. Adaptasi dilakukan melalui penyesuaian bunyi dan penerjemahan. Tulisan ini bertujuan mengungkapkan bagaimana penutur Indonesia menyerap kata asing dalam komunikasi bahasa Indonesia dan sejauh mana kata serapan asing tersebut berterima dan bermanfaat bagi penutur Indonesia. Responden penelitian ini adalah kelompok pendidik (guru dan dosen) dan peserta didik SMA dan perguruan tinggi (siswa dan mahasiswa) di tiga provinsi di Indonesia, yaitu Sumatra Barat, Riau, dan Jambi. Data diperoleh melalui angket dan wawancara dengan 120 orang responden yang dipilih secara acak. Kemudian, data dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian penutur Indonesia cenderung melakukan penerjemahan dan adaptasi bunyi dalam menggunakan kosakata asing untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Kata serapan bahasa asing dapat diterima oleh penutur Indonesia, tetapi belum dimanfaatkan dalam komunikasi lisan maupun tulisan.

**Kata-kata kunci:** kata serapan, adopsi, adaptasi, berterima, bermanfaat.

#### **Abstract**

*The emergence of foreign language absorption in information technology written in the Indonesian language has enriched the Indonesian vocabulary as the language used in formal and informal communication. The word absorption is needed as the emergence of new vocabulary of foreign languages follows the development of information technology. Absorption of foreign words can be done through adoption and adaptation. Adaptation is done through sound adjustment and translation. This paper aims to reveal how Indonesian speakers absorb foreign words in Indonesian communications, and how far the absorption is acceptable and useful to Indonesian speakers. Respondents of this research are group of educators (teachers and lecturers) and high school and college students in three provinces in Indonesia, namely West Sumatra, Riau, and Jambi. Data were obtained through questionnaires and interviews to 120 randomly selected*



*respondents. Then the data are analyzed descriptively. The results show that some Indonesian speakers tend to do translation and sound adaptation in using foreign vocabulary to communicate using the Indonesian language. The words of foreign language absorption can be accepted by Indonesian speakers but have not been utilized in oral and written communications.*

**Keywords:** *word absorption, adoption, adaptation, acceptable, useful.*

## **PENDAHULUAN**

Bidang teknologi informasi adalah bidang ilmu yang banyak menyumbang kosakata baru kata serapan bahasa Indonesia. Hal ini terjadi karena teknologi informasi muncul dari negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Oleh karena itu, tidak dimungkiri akan munculnya istilah baru bahasa Inggris seiring dengan menyebarnya teknologi informasi baru tersebut ke seantero dunia. Kemunculan produk teknologi informasi baru akan diiringi dengan munculnya sejumlah kosakata baru, termasuk yang merujuk pengoperasian produk tersebut. Kehadiran internet, misalnya, telah memunculkan istilah *download, upload, e-mail, online, offline, mouse*, dan sebagainya yang tentu saja tidak asing bagi pengguna internet di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Pada awalnya istilah baru teknologi informasi tersebut menggunakan kosakata asing melalui proses adopsi, yaitu memungut kata asing tersebut untuk digunakan dalam menyampaikan informasi dalam bahasa Indonesia. Seiring berjalannya waktu terjadi proses adaptasi, penyesuaian dengan sistem pelafalan dan tata bahasa bahasa Indonesia atau melalui peminjaman makna kosakata aslinya. Melalui proses inilah terjadi penyerapan kata asing menjadi kosakata serapan bahasa Indonesia (Darheni, 2009; Greavu, 2013). Kosakata asing dan kosakata serapan ini muncul dalam komunikasi bahasa Indonesia dengan harapan penutur Indonesia akan memilih menggunakan kosakata serapan bahasa Indonesia dibandingkan dengan kosakata asing.

Proses penyerapan bahasa dapat dilakukan melalui beberapa proses, yaitu adopsi dan adaptasi (Pusat Bahasa, 2007). Adopsi dilakukan dengan memungut langsung kosakata asing tersebut tanpa ada perubahan, sedangkan adaptasi dilakukan melalui penyesuaian bunyi dan penerjemahan (Capuz, 1997; Sugono, 2009; Zaim, 2015). Selanjutnya, Capuz (1997) menyatakan bahwa dalam proses adaptasi, di samping proses ambil dan ubah (*loanblends*), dapat juga terjadi peminjaman makna (*semantic borrowing*), yaitu bukan kosakata asing yang diambil, melainkan makna dari kata tersebut yang dinyatakan dalam bahasa yang akan digunakan.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) telah melakukan banyak hal untuk mengatur pembentukan istilah bahasa Indonesia dari bahasa asing. Pengindonesiaan istilah asing itu juga telah dipublikasikan agar dapat digunakan secara tepat dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Namun, kenyataannya banyak orang Indonesia yang enggan menggunakan istilah bentukan Badan Bahasa tersebut. Hal itu terbukti dengan masih maraknya istilah asing yang muncul, baik di media massa, media sosial, maupun media komunikasi lisan sehari-hari penutur bahasa Indonesia. Lihatlah iklan berikut ini: “Lebaran HOT SALE up to 77%, Lucky DIP, Gift Voucher, Hadiah Langsung” (*Padang Ekspres*, 25 Mei 2018); “Beli mobil baru Xtra cashback s.d. 1,5 juta” (*Kompas*,



25 Mei 2018); “Kirim surat ke alamat redaksi .... [E-mail red@tempo.co.id](mailto:red@tempo.co.id)” (*Tempo*, 21—27 Mei 2018). Iklan-iklan tersebut masih mengadopsi bahasa asing. Bukankah sudah ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia? Apakah masyarakat tidak menerima padanan kata bahasa Indonesia untuk kata-kata bahasa asing di atas?

Permasalahan dalam penyerapan kosakata asing adalah sejauh mana keberterimaan dan kebermanfaatannya kosakata serapan itu oleh masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh ahli bahasa dan praktisi kebahasaan tentang masalah penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Sutejo, Mustakim, dan Suladi (2000) dalam hasil penelitiannya “Keberterimaan Kosakata Baku Bahasa Indonesia” mengungkapkan bahwa antara kosakata baku dan tidak baku hampir sama persentase penggunaannya. Sementara itu, Gunarwan (1995) dan Mustakim (1997) dalam penelitiannya tentang keberterimaan kosakata baru menemukan bahwa hanya sebagian kecil penutur bahasa Indonesia yang dapat menerima kosakata baru bahasa Indonesia dalam komunikasi mereka. Mustakim (1997) menyatakan, hanya 12,5% dari kosakata baru yang berstatus sangat berterima, 42,5% berterima, dan 45% berstatus setengah berterima. Itu membuktikan bahwa masyarakat penutur bahasa menggunakan kosakata yang mereka tahu tanpa memedulikan apakah kosakata itu baku atau tidak baku, kosakata asing atau kosakata serapan, yang penting mereka dapat saling mengerti tentang apa yang mereka sampaikan. Dari sisi pembinaan bahasa tentu hal ini belum memuaskan karena tujuan pembinaan bahasa adalah agar masyarakat penutur bahasa Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sikap masyarakat akan memengaruhi keberhasilan kebijakan bahasa secara nasional (Sutejo, Mustakim, dan Suladi, 2000).

Pengguna bahasa akan berbahasa sesuai dengan apa yang didengar, dibaca, dan dilihatnya sehari-hari. Bahasa pejabat dan media massa akan menjadi anutan dalam hal penggunaan kosakata tertentu untuk kepentingan penyampaian pesan. Pengguna bahasa akan enggan menggunakan kata serapan apabila adopsi masih masif digunakan di media massa dan nonmedia massa. Mereka masih mendengar melalui berita televisi dan radio, membaca koran dan majalah, dan melihat bagaimana para pemimpin berbahasa Indonesia. Inilah yang mereka tiru dan terapkan dalam berkomunikasi lisan dan tulisan.

Kajian tentang keberterimaan dan kebermanfaatannya kosakata serapan bahasa asing bidang teknologi informasi perlu dilakukan karena kosakata tersebut banyak digunakan oleh kalangan pengguna bahasa Indonesia di berbagai lapisan masyarakat. Kajian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan bahasa dalam membuat kata serapan yang dapat digunakan oleh masyarakat banyak. Penciptaan istilah baru yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat tentu akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Untuk itu, perlu kajian yang komprehensif bagaimana kosakata serapan tersebut berterima dan bermanfaat bagi penutur bahasa Indonesia.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan empat hal, yaitu (1) bagaimana Badan Bahasa melakukan penyerapan kata asing ke dalam bahasa Indonesia, (2) bagaimana penutur Indonesia melakukan penyerapan kata asing ke dalam bahasa Indonesia, (3) sejauh mana kosakata asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia berterima oleh penutur Indonesia, dan (4) sejauh mana kosakata asing



yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dimanfaatkan oleh penutur Indonesia.

## LANDASAN TEORI

Secara umum dapat dinyatakan bahwa kosakata baru bahasa Indonesia dibentuk melalui tiga proses pembentukan, yaitu perubahan bentuk, penyerapan, dan penerjemahan (Pusat Bahasa, 2007; Sugono, 2009; Zaim, 2015). Perubahan bentuk dilakukan, antara lain, melalui proses afiksasi, akronim, *blending*, dan *clipping* terhadap kosakata yang ada (Zaim, 2015); penyerapan dilakukan melalui peminjaman kosakata dari bahasa lain (bahasa daerah/bahasa asing), dan penerjemahan dilakukan melalui alih makna (*semantic borrowing*) (Capuz, 1997) Penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia diatur dalam buku *Pengindonesiaan Istilah Asing* (Sugono, 2009) dan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2004). Dalam proses penyerapan terjadi penyesuaian ucapan dan ejaan sesuai dengan aturan tata bahasa bahasa Indonesia (Sengkey, 2016; Rosa & Zaim, 2014).

Kosakata serapan dari bahasa asing haruslah berterima dan bermanfaat bagi penutur bahasa Indonesia. Apabila tidak berterima, kosakata itu akan menjadi “asing” bagi penutur bahasa Indonesia dan sudah barang tentu tidak bermanfaat dan tidak akan dimanfaatkan oleh penutur Indonesia dalam berkomunikasi lisan dan tulis. Apabila berterima menurut rasa bahasa penutur asli Indonesia, dengan sendirinya akan dimanfaatkan untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana keberterimaan dan kebermanfaatan kosakata serapan ini oleh penutur asli bahasa Indonesia.

*Keberterimaan* menurut KBBI berarti ‘dapat diterima’ atau ‘hal atau keadaan berterima’ (<https://www.kamusbesar.com/keberterimaan>). Jadi, keberterimaan adalah dapat diterimanya suatu keadaan oleh masyarakatnya. Keberterimaan dalam kajian ini adalah dapat diterimanya kosakata serapan asing yang telah ditetapkan oleh Badan Bahasa oleh penutur bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Keberterimaan ini dibuktikan dengan mengetahui adanya kosakata serapan dimaksud dan merasa tidak asing dengan kosakata serapan itu.

*Bermanfaat* menurut KBBI berarti ‘berguna’ atau ‘berfaedah’ (<https://kbbi.web.id/manfaat>). Kebermanfaatan dapat diartikan keadaan bahwa sesuatu itu berguna atau berfaedah bagi masyarakat. Kebermanfaatan dalam kajian ini adalah bergunanya atau berfaedahnya kosakata serapan asing yang telah ditetapkan oleh Badan Bahasa oleh penutur bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Kebermanfaatan ini dibuktikan dengan digunakannya kosakata tersebut dalam berkomunikasi bahasa Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian tentang keberterimaan dan kebermanfaatan kosakata asing dalam bidang teknologi informasi ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan secara analitis penggunaan kosakata asing dalam bidang teknologi informasi yang diserap dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris oleh penutur bahasa Indonesia. Kata serapan yang dianalisis adalah 20 kosakata serapan bahasa asing dalam bidang teknologi informasi yang diambil dari laman Pojok Bahasa, Badan Bahasa (2018). Data diperoleh dengan





menyebarkan angket kepada 120 responden penutur bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan, yaitu siswa SMA, mahasiswa, guru, dan dosen, yang berada di Sumatra Barat, Riau, dan Jambi. Responden diminta memberikan tanggapan tentang sejauh mana 20 kosakata yang diberikan tersebut berterima dan bermanfaat bagi responden dalam berkomunikasi lisan dan tulis. Keberterimaan dilihat dari pemahamannya terhadap kosakata serapan yang diberikan, sedangkan kebermanfaatannya diukur dari kekerapan penggunaan kosakata tersebut dalam komunikasi lisan dan tulis.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini akan mengungkapkan empat hal, yaitu penyerapan kosakata asing menurut Badan Bahasa dan menurut responden, keberterimaan kosakata asing, dan kebermanfaatannya kosakata asing.

### 1. Penyerapan Kosakata Asing ke dalam Bahasa Indonesia Menurut Badan Bahasa

Penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui proses adopsi dan adaptasi. Adopsi dilakukan dengan cara memungut kata asing menjadi kata Indonesia secara apa adanya dan tanpa perubahan,. Sementara itu, adaptasi dilakukan dengan cara pengubahan bunyi, penerjemahan, dan peminjaman makna.

Dari empat bentuk penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia tersebut, penyerapan kosakata asing yang dilakukan oleh Badan Bahasa untuk 20 kosakata yang diteliti hanya berupa adaptasi, dengan dua bentuk penyerapan, yaitu penerjemahan dan peminjaman makna. Penerjemahan dilakukan secara kata per kata sesuai dengan unsur kata yang ada pada bahasa asing yang diserap dan penerjemahan sebagian. Peminjaman makna dilakukan dengan melihat makna kata asing yang akan diserap secara keseluruhan dan kemudian dicarikan padanan katanya dengan kata yang ada, atau dibentuk dari khazanah kata yang ada dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah di Indonesia. Lihatlah data pada tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Bentuk Serapan Kata Asing Menurut Badan Bahasa**

No.	Kata Asing	Kata Serapan Bahasa Indonesia	Bentuk Serapan		
			Adopsi	Adaptasi	
			Ubah Bunyi	Penerjemahan	Peminjaman Makna
1	<i>bar code</i>	kode batang			v
2	<i>blogger</i>	narablog	v		v
3	<i>browser</i>	peramban			v
4	<i>cache memory</i>	memori tembolok	v		v
5	<i>contact person</i>	narahubung			v
6	<i>copy-paste</i>	salin-tempel			v
7	<i>email</i>	pos-el			v
8	<i>gadget</i>	gawai			v
9	<i>microphone</i>	pelantang			v
10	<i>mouse</i>	tetikus			v
11	<i>netizen</i>	warganet		v	
12	<i>offline</i>	luring		v	
13	<i>online</i>	daring		v	
14	<i>power bank</i>	bank daya		v	

No.	Kata Asing	Kata Serapan Bahasa Indonesia	Bentuk Serapan			
			Adopsi	Adaptasi		
				Ubah Bunyi	Penerjemahan	Peminjaman Makna
15	<i>preview</i>	pratayang		v	v	
16	<i>selfie</i>	swafoto				v
17	<i>server</i>	peladen			v	
18	<i>website</i>	laman				v
19	<i>hyperlink</i>	pranala				v
20	<i>wireless</i>	nirkabel			v	

Tabel di atas menunjukkan, dari 20 kosakata hanya ada dua pilihan penyerapan bahasa asing yang digunakan oleh Badan Bahasa, yaitu penerjemahan dan peminjaman makna, tidak ada saran untuk melakukan adopsi atau adaptasi berupa ubah bunyi. Dari 13 kata yang diserap melalui penerjemahan, 5 kata diterjemahkan kata per kata, yaitu *bar code* ‘kode batang’, *contact person* ‘narahubung’, *copy-paste* ‘salin-tempel’, *wireless* ‘nirkabel’, dan *server* ‘peladen’; 4 kata diterjemahkan sebagian dan sebagian lainnya diadopsi, yaitu *blogger* ‘narablog’, *cache memory* ‘memori tembolok’, *netizen* ‘warganet’ dan *power bank* ‘bank daya’; dan 3 kata lainnya melalui proses penerjemahan dan *blending*, yaitu *email* ‘pos-el’ (pos elektronik), *offline* ‘luring (luar jaringan)’, dan *online* ‘daring’ (dalam jaringan); serta 1 kata dengan penerjemahan sebagian dan adaptasi ubah bunyi, yaitu *preview* ‘pratayang’. Adapun pada 7 kosakata lainnya dilakukan penyerapan melalui peminjaman makna, yaitu *browser* ‘peramban’, *gadget* ‘gawai’, *microphone* ‘pelantang’, *mouse* ‘tetikus’, *selfie* ‘swafoto’, *website* ‘laman’, dan *hyperlink* ‘pranala’.

## 2. Penyerapan Kosakata Asing ke dalam Bahasa Indonesia Menurut Responden

Untuk mengetahui padanan kosakata asing dalam bahasa Indonesia, kepada responden diberikan daftar 20 kosakata asing yang sebetulnya sudah ada kata serapannya dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, kepada responden tidak diberikan kata serapan tersebut sehingga responen bebas menyampaikan apa yang mereka ketahui tentang padanan kata bahasa Indonesia kosakata asing yang diberikan. Bagaimana padanan kata bahasa Indonesia tersebut menurut responden penutur bahasa Indonesia? Ada beragam jawaban yang diberikan, tetapi mayoritas responden menerjemahkan kata tersebut atau mengadopsi dan melakukan adaptasi ubah bunyi. Lihatlah Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**  
**Padanan Kosakata Asing dalam Bahasa Indonesia Menurut Responden**

No	Kata Asing	Kata Serapan Bahasa Indonesia	Bentuk Serapan Menurut Responden			
			Adopsi	Adaptasi		
				Ubah Bunyi	Penerjemahan	Peminjaman Makna
1	<i>bar code</i>	kode batang		barkot, barkod	kode bar, kode elektronik, penanda	
2	<i>blogger</i>	narablog			pemilik blog, penulis blog, pembuat blog	
3	<i>browser</i>	peramban	browser		pengakses internet, menjelajah internet	

No	Kata Asing	Kata Serapan Bahasa Indonesia	Bentuk Serapan Menurut Responden			
			Adopsi	Adaptasi		
				Ubah Bunyi	Penerjemahan	Peminjaman Makna
4	<i>cache</i> <i>memory</i>	memori tembolok			penyimpan data	
5	<i>contact person</i>	narahubung		kontak person	kontak pribadi, nomor yang bisa dihubungi	
6	<i>copy</i> <i>paste</i>	salin rekat		kopi paste	kopi dan salin, peniruan, menyalin	
7	<i>email</i>	pos-el	e-mail		surat elektronik,	
8	<i>gadget</i>	Gawai			alat komunikasi pintar, telepon pintar, perangkat, telepon seluler	
9	<i>microphone</i>	pelantang		mik, mikrofon	pengeras suara,	
10	<i>mouse</i>	tetikus		maus	tikus, penggerak kursor	
11	<i>netizen</i>	warganet			masyarakat media, warga internet, pengguna internet	
12	<i>offline</i>	luring	offline		tidak tersambung, tidak dalam jaringan, tidak terhubung, tidak aktif, tidak ada jaringan, terputus dengan internet	
13	<i>online</i>	daring	online		tersambung, dalam jaringan, terhubung, aktif, ada jaringan, terhubung dengan internet	
14	<i>power</i> <i>bank</i>	bank daya			sumber energi, sumber daya, bank listrik, penambah daya, penyimpan daya, pengisi daya	
15	<i>preview</i>	pratayang			tinjauan awal, tinjauan	
16	<i>selfie</i>	swafoto		selfi	foto diri sendiri, berfoto sendiri, foto diri, mengambil foto sendiri, tampilan diri	
17	<i>server</i>	peladen	server		penyedia jaringan, pengoperasi, komputer induk	
18	<i>website</i>	laman		situs web	situs	
19	<i>hyperlink</i>	pranala	hyperlink		tautan	
20	<i>wireless</i>	nirkabel		werles	tanpa kabel	



Data tersebut menunjukkan bahwa penutur bahasa Indonesia lebih cenderung melakukan penerjemahan dalam menyerap kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia. Secara umum terjemahan oleh responden benar, tetapi tidak tepat seperti yang telah dibakukan oleh Badan Bahasa. Lihatlah contoh terjemahan dari kata *online* yang mereka terjemahkan menjadi ‘dalam jaringan’, tetapi oleh Badan Bahasa dibuat dalam bentuk kata *blending*, yaitu ‘daring’, *blending* dari ‘dalam jaringan’. Terjemahan lain untuk kata *online* ini oleh responden adalah ‘tersambung’, ‘terhubung’, ‘terhubung dengan internet’, dan ‘aktif’. Sementara itu, responden menerjemahkan kata *offline* menjadi ‘tidak terhubung’, ‘tidak ada jaringan’, ‘tidak dalam jaringan’, ‘tidak tersambung’, ‘terputus dengan internet’, dan ‘tidak aktif’. Oleh Badan Bahasa, kata itu diterjemahkan menjadi ‘luar jaringan’ yang dibuat menjadi kata *blending* ‘luring’.

Beberapa penutur juga melakukan adopsi, misalnya untuk kata *browser*, *e-mail*, *offline*, *online*, *server*, dan *hyperlink*. Bentuk serapan lainnya adalah adaptasi ubah bunyi dalam menyerap kata asing tersebut, seperti yang dilakukan responden pada kata *bar code* menjadi ‘barkot’ dan ‘barkod’, *contact person* menjadi ‘kontak person’, *microphone* menjadi ‘mikrofon’, *mouse* menjadi ‘maus’, dan *selfie* menjadi ‘selfi’.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah mengetahui dan memahami kosakata asing yang nantinya akan mereka tentukan keberterimaan dan kebermanfaatannya. Hal itu dibuktikan dengan ketepatan terjemahan yang mereka buat atau adopsi dan adaptasi ubah bunyi yang mereka buat terhadap kosakata asing yang diberikan.

### 3. Keberterimaan Kosakata Serapan Bahasa Asing

Keberterimaan adalah sejauh mana kosakata asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dapat dipahami dan dirasakan sebagai bahasa Indonesia oleh penutur Indonesia sehingga mereka mau menggunakannya dalam komunikasi lisan dan tulis. Kepada responden diberikan daftar 20 kata serapan asing dalam bahasa Indonesia dan mereka diminta menentukan apakah kosakata serapan tersebut berterima atau tidak berterima. Keberterimaan kata serapan kosakata asing oleh penutur bahasa Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3**  
**Keberterimaan Kata Serapan oleh Penutur Indonesia**

No.	Kata	Pilihan Jawaban			
		Berterima		Tidak Berterima	
		f	%	f	%
1	kode batang	79	66	41	34
2	narablog	52	43	68	57
3	peramban	70	58	50	42
4	memori tembolok	36	30	84	70
5	narahubung	91	76	29	24
6	salin rekat	78	65	42	35
7	pos-el	86	72	34	28
8	gawai	62	52	58	48
9	pelantang	70	58	50	42
10	tetikus	34	28	86	72
11	warganet	78	65	42	35
12	luring	44	37	76	63
13	daring	48	40	72	60

No.	Kata	Pilihan Jawaban			
		Berterima		Tidak Berterima	
		f	%	f	%
14	bank daya	55	46	65	54
15	pratayang	84	70	36	30
16	swafoto	60	50	60	50
17	peladen	46	38	74	62
18	laman	108	90	12	10
19.	pranala	36	30	84	70
20.	nirkabel	60	50	60	50
	<b>Jumlah</b>	1.296		1.104	
	<b>Rata-rata</b>	65	54%	55	46%

Tabel di atas menunjukkan bahwa 46% kosakata serapan belum berterima oleh mayoritas responden dan mereka lebih menerima kosakata asingnya. Sementara itu, 56% responden menyatakan kosakata asing lebih berterima daripada kosakata serapannya. Kata serapan yang tingkat keberterimaannya tinggi adalah kata *narahubung*, *surel*, *pratayang*, dan *laman*. Kata serapan yang tingkat keberterimaannya sedang adalah kata *kode batang*, *peramban*, *salin rekat*, *gawai*, *pelantang*, dan *warganet*. Kata serapan yang tingkat ketidakberterimaannya tinggi adalah kata *memori tembolok*, *tetikus*, dan *pranala*. Sementara yang tingkat ketidakberterimaannya rendah adalah *narablog*, *luring*, *daring*, *bank daya*, dan *peladen*. Dua kata serapan yang tingkat keberterimaannya dan ketidakberterimaannya seimbang, yaitu kata *swafoto* dan *nirkabel*.

#### 4. Kebermanfaatan Kosakata Serapan Bahasa Asing

Kebermanfaatan adalah sejauh mana kosakata asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dimanfaatkan oleh penutur Indonesia untuk berkomunikasi lisan dan tulis. Temuan pada keberterimaan kata serapan menunjukkan bahwa sebagian besar kosakata asing lebih berterima dibandingkan dengan kosakata serapan. Hal itu menunjukkan bahwa responden lebih sering memanfaatkan atau menggunakan kosakata asing daripada kosakata serapannya dalam bahasa Indonesia. Kebermanfaatan kata asing oleh penutur Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4**  
**Kebermanfaatan Kata Asing oleh Penutur Bahasa Indonesia**

No.	Bahasa Inggris	1		2		3		4		5	
		Tidak Pernah		Jarang		Kadang-Kadang		Sering		Sangat Sering	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	<i>bar code</i>	8	7	18	16	13	11	49	41	30	25
2	<i>blogger</i>	4	3	8	7	23	19	42	35	43	36
3	<i>browser</i>	4	3	2	2	8	7	46	38	60	50
4	<i>cache memory</i>	18	15	42	35	24	20	24	20	12	10
5	<i>contact person</i>	4	3	2	2	13	11	43	36	57	48
6	<i>copy paste</i>	4	3	1	1	2	2	31	26	82	6

No.	Bahasa Inggris	1		2		3		4		5	
		Tidak Pernah		Jarang		Kadang-Kadang		Sering		Sangat Sering	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
											8
7	<i>email</i>	4	3	0	0	0	0	26	22	89	7
8	<i>gadget</i>	6	5	2	2	8	7	24	20	79	6
9	<i>microphone</i>	5	3	4	3	19	16	38	32	55	4
10	<i>mouse</i>	4	4	4	3	8	7	39	33	64	5
11	<i>netizen</i>	6	5	10	8	7	6	39	33	57	4
12	<i>offline</i>	4	3	1	1	6	5	31	27	77	6
13	<i>online</i>	5	4	2	2	2	2	22	18	88	7
14	<i>power bank</i>	4	3	2	2	10	8	31	27	72	6
15	<i>preview</i>	4	3	12	10	24	21	37	31	42	3
16	<i>selfie</i>	4	3	2	2	6	5	30	25	78	6
17	<i>server</i>	4	3	10	8	25	22	26	22	54	4
18	<i>website</i>	2	2	4	3	4	3	34	28	77	6
19	<i>hyperlink</i>	16	14	42	35	23	19	22	18	17	1
20	<i>wireless</i>	4	3	2	2	6	5	31	26	77	6
	Jumlah	114		170		241		665		1.210	4
	Rata-Rata	6	5%	8	7%	12	10%	33	28%	61	5
											0
											%

Tabel di atas menunjukkan bahwa 50% responden menyatakan *sangat sering* menggunakan kosakata asing dibandingkan dengan kosakata serapannya dan 28% menyatakan *sering* menggunakan kosakata asing tersebut. Yang tidak pernah menggunakan hanya 5% dari jumlah responden, itu pun hanya untuk beberapa kosakata asing seperti *cache memory* dan *pranala*. Kata asing yang tingkat keseringan penggunaannya tinggi dalam komunikasi yang dilakukan oleh responden adalah kata *browser*, *contact person*, *copy paste*, *email*, *gadget*, *mouse*, *offline*, *online*, *power bank*, *selfie*, *website*, dan *wireless*. Kosakata itu hampir semuanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari di dunia pendidikan.

Lalu, seberapa seringkah kosakata serapan dari bahasa asing di atas digunakan oleh penutur bahasa Indonesia dalam berkomunikasi lisan dan tulis? Lihatlah data pada tabel berikut ini.

**Tabel 5**  
**Kebermanfaatan Kata Serapan oleh Penutur Indonesia**

No	Kata Serapan dari Bahasa Asing	1		2		3		4		5	
		Tidak Pernah		Jarang		Kadang-Kadang		Sering		Sangat Sering	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	kode batang	38	32	34	28	24	20	21	18	2	2
2	narablog	64	53	34	28	20	17	1	1	1	1
3	peramban	77	64	30	25	10	8	5	4	0	0
4	memori tembolok	80	67	27	23	10	8	2	2	0	0
5	narahubung	64	53	26	22	24	20	4	3	2	2
6	salin rekat	60	50	42	35	10	8	6	5	2	2
7	pos-el	37	31	31	26	25	21	22	18	5	4
8	gawai	77	64	24	20	17	14	1	1	1	1
9	pelantang	65	55	32	27	10	9	5	4	6	5
10	tetikus	88	73	16	13	12	10	1	1	4	3
11	warganet	47	39	16	13	34	28	16	13	8	7
12	luring	74	62	24	20	12	10	6	5	4	3
13	daring	73	61	28	23	13	11	4	3	2	2
14	bank daya	68	57	36	30	11	9	4	3	1	1
15	pratayang	73	61	29	24	10	8	2	2	6	5
16	swafoto	82	68	16	13	17	14	5	4	1	1
17	peladen	91	76	18	15	7	6	1	1	2	2
18	laman	36	30	24	20	18	15	35	29	7	6
19	pranala	84	70	28	23	7	6	1	1	0	0
20	nirkabel	72	60	12	10	17	14	17	14	2	2
	Jumlah	1.350		527		308		159		56	
	Rata-rata	68	57%	26	22%	15	12%	8	7%	3	2%

Tabel di atas menunjukkan bahwa 57% responden *tidak* menggunakan kata serapan asing dalam berkomunikasi, 22% responden *jarang* menggunakannya, dan 12% responden *kadang-kadang* menggunakannya. Responden yang *sering* dan *sangat sering* menggunakan kata serapan asing hanyalah 2% dan 7%. Dari 20 kata serapan asing di atas, hanya 4 kata yang agak sering digunakan oleh responden, yaitu kata *kode batang*, *pos-el*, *warganet*, dan *laman*. Kata yang persentasenya tinggi karena *tidak pernah* digunakan adalah kata *peladen*, *tetikus*, *pranala*, dan *memori tembolok*. Kata-kata itu kedengarannya asing bagi telinga responden sehingga mereka lebih menyukai kosakata asingnya.

## PEMBAHASAN

Penyerapan kosakata asing menjadi kata serapan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Badan Bahasa sebagian besar melalui proses penerjemahan dan yang lainnya melalui proses peminjaman makna. Penerjemahan dilakukan, baik secara menyeluruh maupun sebagian dari kata asing yang diserap. Sementara itu, peminjaman makna dilakukan dengan mencari padanannya yang ada dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah di Indonesia. Prinsip ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh para ahli bahasa dan peneliti seperti Capuz (1997), Sugono (2009), Silva (2012), Fauzi (2014), Rosa & Zaim (2014), dan Zaim (2015).

Penutur bahasa Indonesia, yang dijadikan responden dalam penelitian ini pada prinsipnya telah mengetahui kata-kata asing yang telah diserap ke dalam



bahasa Indonesia. Hal itu terbukti dari ketepatan terjemahan yang mereka lakukan ketika diminta mencari padanan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan merupakan cara yang paling banyak dilakukan oleh penutur Indonesia untuk memadankan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, mereka melakukan adopsi dan adaptasi bunyi terhadap kosakata asing. Tidak ada responden yang melakukan peminjaman makna seperti yang dikemukakan oleh Capuz (2007). Hal itu sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imran (2005), Juanda (2014), dan Marmiene (2015).

Tentang kebermanfaatan serapan kata asing, meskipun Badan Bahasa telah menentukan padanan bahasa Indonesia untuk kata asing dalam bentuk kata serapan, belum semua penutur bahasa Indonesia memahaminya. Akibatnya, kata serapan tersebut belum dimanfaatkan oleh penutur bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Hal itu sejalan dengan penelitian Gunarwan (1995) yang menyatakan bahwa hanya 10% dari kosakata baru bahasa Indonesia yang digunakan oleh penutur Indonesia (Sutejo, Mustakim, & Suladi (2000). Untuk itu, media massa dan pemuka masyarakat perlu secara taat asas menggunakan kosakata yang telah ditetapkan padanannya dalam bahasa Indonesia ketika menyampaikan berita, baik secara tulis melalui koran, majalah, dan media berita lainnya maupun melalui ujaran lisan seperti melalui televisi dan radio. Seringnya padanan kata itu digunakan oleh media massa dan pemuka masyarakat akan memengaruhi penggunaannya dalam berkomunikasi oleh penutur Indonesia (Putra, Suryanto, & Mulyono, 2015).

Pepatah mengatakan “bahasa menunjukkan bangsa”. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi antarpenutur bahasa Indonesia akan memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi akan memperkuat jati diri bangsa Indonesia yang mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang mempunyai kosakata yang lengkap sebagai bahasa formal, informal, akademis, dan nonakademis.

## **PENUTUP**

Kata serapan bahasa Indonesia dari bahasa asing dibuat melalui proses adopsi dan adaptasi. Proses adaptasi yang sering digunakan adalah bentuk penerjemahan, peminjaman makna, dan pengubahan bunyi. Penutur bahasa Indonesia lebih cenderung menerjemahkan kosakata asing dalam proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, di samping mengadopsi dan mengadaptasi bunyi. Kosakata asing yang diserap sebagian besar belum dapat diterima oleh penutur Indonesia walaupun kadar ketidak-berterimaannya tidak terlalu tinggi. Sementara itu, kata asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagian besar belum dimanfaatkan oleh penutur Indonesia dalam komunikasi lisan dan tulis. Untuk itu, perlu diupayakan untuk lebih mengintensifkan penggunaan kata serapan melalui media massa, baik tulis maupun cetak, dan melalui pencontohaan pemakaian oleh para pemimpin bangsa dan orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Capuz, J.G. (1997). "Toward a Typological Classification of Linguistic Borrowing". *Revista Alicantina de Estudios Ingleses*, 10, 81—97.
- Darheni, N. (2009). "Penyerapan Leksikon Asing dalam Bidang Otomotif ke Dalam Bahasa Indonesia: Tinjauan Secara Morfologis dan Fonologis". *Jurnal Sositologi*, 17 (8), 646—666.
- Fauzi, I. (2014). English Borrowings in Indonesian Newspapers. *Journal on English as a Foreign Language*, 4 (1), 15—27.
- Gunarwan, A. (1995). "Degrees of Acceptance of Newly Coined Words in Corpus Planning of Indonesian Language". *The Fifth Conference of the Southeast Asian Linguistics Society*, Arizona.
- Greavu, A. (2013). *A Classification of Borrowings: Observations from Rumanian/English Contact*. Editura Muzeul Literaturii Romane, 95—104.
- Imran, I. (2005). "Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia". *Prosiding Seminar Nasional PESAT 2005*. Jakarta, 23—24 Agustus 2005.
- Juanda. (2014). "Translation and Absorption of Foreign Language in the Automotive Field into the Indonesian: Effort in Intellectualizing Nation". *International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World*. 5 (3), 149—166.
- Marmiene, A. (2015). "The Use of Lexical Borrowings and Their Lithuanian Equivalents in the Computer-Mediated Environment in Students' Speech". *Santalka: Filologija, Educologija*, 23 (2), 119—126.
- Pusat Bahasa. (2004). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Pusat Bahasa. (2007). *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Putra, D.S., Suryanto, E., & Mulyono, S. (2015). "Kata Serapan pada Kolom *Iki Lho* di Harian *Joglo Semar* (Pola dan Latar Belakang Penggunaan)". *BASASTRA Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pengajarannya*, 3 (3), 1—15.
- Rosa, R.N. & Zaim, M. (2014). "Shift in Indonesian Word Formation Process". *Proceeding of Seminar in Language and Teaching (SELT) 2*, Padang, 11—12 June 2014.
- Sengkey, S.D. (2016). "Kata-kata Pinjaman Bahasa Inggris dalam Bahasa Indonesia pada Koran Harian *Manado Post*". *Jurnal Skripsi*. Manado: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sam Ratulangi.
- Silva, A.M. (2012). "The English Borrowings and the Indonesian-English Code-Switching in Two Collection of Blog Short-Stories". *Kata*. <http://kata.petra.ac.id>, 9—17.
- Sugono, D. (2009). *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Sutejo, Mustakim, & Suladi. (2000). *Keberterimaan Kosakata Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Zaim, M. (2015). "Pergeseran Sistem Pembentukan Kata Bahasa Indonesia: Kajian Akronim, Blending, dan Kliping". *Linguistik Indonesia*, 33 (2), 173—192.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : M. Zaim  
Judul Makalah : “Keberterimaan dan Kebermanfaatan Serapan Kata Asing dalam Bidang Teknologi Informasi oleh Penutur Indonesia”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 10.15—11.45  
Moderator : Dr. Syarifuddin, M.Hum.  
Pencatat : 1. Elvi Suzanti  
2. Inayatussalihah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Kemunculan kosakata baru sejalan dengan kemunculan produk teknologi informasi. Kosakata baru itu ada yang diadaptasi, diambil maknanya, dan diubah bentuknya.
2. Kenyataan di lapangan, kosakata baru asing itu diterima begitu saja oleh masyarakat. Padanan atau serapan kosakata asing yang sudah dibuat jarang digunakan.
3. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mengapa istilah-istilah asing yang dibuat oleh Badan Bahasa tidak digunakan oleh masyarakat dan bagaimana keberterimaan kosakata serapan. Penelitian dilakukan di lingkungan pendidikan dengan responden dosen dan mahasiswa.
4. Kosakata baru bahasa Indonesia dibentuk melalui tiga proses: adopsi, adaptasi, dan penerjemahan. Adaptasi berupa perubahan bunyi dan peminjaman makna.
5. Temuan penelitian, antara lain, meliputi kosakata asing yang sebagian besar diserap oleh responden melalui proses penerjemahan, seperti *bar code* menjadi kode batang. Hanya sedikit responden yang memahami padanan kata serapan yang diusulkan oleh Badan Bahasa.
6. Ada beberapa padanan kata asing yang tidak berterima oleh responden, seperti tetikus sebagai padanan dari *mouse*.
7. Istilah asing lebih sering digunakan daripada padanannya dalam bahasa Indonesia.
8. Padanan kosakata dalam bahasa Indonesia perlu disosialisasikan dan diintensifkan penggunaannya bagi masyarakat.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Yayah B. Lumintintang  
Instansi : Unas

**Pertanyaan:**

Istilah dan kosakata merupakan konsep yang berbeda. Dalam tulisan ini tidak dibedakan antara istilah dan kosakata. Apakah siswa/mahasiswa dan guru/dosen yang dijadikan responden dalam penelitian ini berasal dari sekolah/ perguruan tinggi yang memiliki peringkat yang sama (unggul atau tidak unggul)? Data-data



yang dipaparkan dalam temuan lebih banyak berasal dari ranah jurnalistik, tetapi di awal pemaparan ranah itu tidak dijelaskan.

**Jawaban:**

Bidang ilmu yang penulis lekatkan dalam tulisan ini adalah teknologi informasi. Kuesioner yang digunakan berasal dari pojok bahasa yang diperoleh dari balai bahasa. Respondennya adalah pengguna bahasa di bidang pendidikan yang berjumlah masing-masing 40 dari tiga provinsi tanpa perbedaan antara sekolah unggul dan tidak unggul. Kosakata yang dipilih dari jurnalistik karena jurnalistik yang banyak berpengaruh pada penggunaan bahasa masyarakat.

**Penanya 2**

Nama : Afif Maulana

Instansi : STKIP

**Pertanyaan:**

Teknologi berkembang dengan cepat. Banyak kosakata baru yang belum ada padanannya menggunakan awalan *me-*. Bagaimana peran masyarakat dalam menyumbangkan kosakata baru?

**Jawaban:**

Pembicara tidak mengkaji apakah kosakata itu sudah diserap atau belum. Sebagian besar kosakata asing itu berbentuk adopsi. Kata mana yang diserap dan tidak merupakan kebijakan Badan Bahasa. Masyarakat dapat mengusulkan padanan untuk kata/istilah asing.

**Penanya 3**

Nama : S. R. H. Sitanggang

Instansi : -

**Pertanyaan:**

Langkah apa yang dapat kita lakukan terhadap orang yang lebih memilih menggunakan istilah atau kosakata asing?

**Jawaban:**

Bahasa adalah kebiasaan. Apabila digunakan, itu menjadi alat menyampaikan ide kita. Bahasa adalah ekspresi.

**Penanya 4**

Nama : Syahrudin

Instansi : Universitas Maros

**Pertanyaan:**

Perlu hati-hati dalam menggunakan kata “serapan”. Apa yang pembicara paparkan belum memperlihatkan apa yang dimaksud dengan kata serapan, kata yang dipaparkan lebih banyak ke istilah asing yang berkaitan dengan IT.



**Jawaban:**

Konsep serapan yang digunakan dalam tulisan ini adalah kata yang dipinjam dari bahasa lain tanpa mengurangi maknanya.

**Isu-Isu Penting:**

Padanan kosakata asing dalam bahasa Indonesia sudah disediakan oleh Badan Bahasa, tetapi belum sepenuhnya diterima oleh penutur bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Badan Bahasa perlu mengintensifkan penggunaan padanan kosakata asing dalam penggunaan bahasa, terutama dalam media massa untuk memperkenalkan padanan itu kepada masyarakat.



## 8. E-Mikuta (Komik Saku Kosakata Elektronik): Media Pembelajaran BIPA Berbasis Teknologi

### E-MIKUTA (KOMIK SAKU KOSAKATA ELEKTRONIK): MEDIA PEMBELAJARAN BIPA BERBASIS TEKNOLOGI

Prima Vidya Asteria<sup>a</sup>, Devi Nur Farida<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup>Universitas Negeri Surabaya

primaasteria@unesa.ac.id; devi.farida1611@gmail.com

#### Abstrak

Perkembangan BIPA saat ini makin pesat ditandai oleh adanya lebih dari 72 negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Namun, media pembelajaran mahasiswa BIPA masih terbatas sehingga peneliti mengembangkan media e-komik untuk kegiatan belajar dan mengajar. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan proses pengembangan E-Mikuta (komik saku kosakata elektronik) sebagai bentuk media pembelajaran BIPA berbasis teknologi dan (2) mendeskripsikan kualitas E-Mikuta sebagai bentuk media pembelajaran BIPA berbasis teknologi. Jenis penelitian ini adalah pengembangan dengan metode R&D (*research and development*). Model pengembangan yang digunakan adalah adaptasi model Sugiyono (2009) dengan tahapan (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, dan (7) revisi produk. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa BIPA Unesa level A2 yang berjumlah empat orang. Data penelitian berupa tahapan proses pengembangan E-Mikuta sesuai dengan model yang telah ditentukan (data kualitatif), hasil validasi, dan uji coba produk (data kuantitatif). Produk divalidasi oleh ahli BIPA (Shendy Mega R., pengajar BIPA Unesa). Data kuantitatif dianalisis dengan uji statistik deskriptif, sedangkan data kualitatif dianalisis secara induktif. Produk berupa komik terdiri atas bagian sampul, tokoh, isi, latihan, refleksi, dan penulis. Sementara itu, berdasarkan hasil validasi ahli disimpulkan bahwa media komik berbasis cerita rakyat ini dipandang layak digunakan dengan sedikit revisi yang ditunjukkan dengan skor 80. Sebagai tindak lanjut, produksi E-Mikuta dapat dikembangkan, baik dari segi ragam isi dan ragam level sasaran sehingga dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran BIPA serta menjadi inspirasi bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lainnya.

**Kata-kata kunci:** komik, E-Mikuta, saku, kosakata, BIPA

#### Abstract

*The development of BIPA is increasingly marked by more than 72 countries studying Indonesian language. However, BIPA student learning media is still limited, so researchers develop e-comic media for teaching and learning activities. The research aims (1) to describe E-Mikuta development process (electronic vocabulary pocket comics) as a form of BIPA-based learning media and (2) to describe the quality of E-Mikuta (electronic vocabulary pocket comics) as a form of learning media BIPA based technology. The type of this research is development by R&D method (Research and Development). The development model used is the adaptation of Sugiyono model (2009) with the stages (1) potential and problems; (2) data collection; (3) product design; (4) design*



*validation; (5) design revisions; (6) product trial; and (7) product revisions. The subject of this research are four students of BIPA Unesa on A2 level. The research data is in the stages of the E-Mikuta development process in accordance with the predetermined model (qualitative data) and the validation and trial results of the product (quantitative data). The product is validated by expert BIPA (Mrs. Shendy Mega R., lecturer of BIPA Unesa). Quantitative data were analyzed by descriptive statistical test, while the qualitative data were analyzed inductively. Comic products consist of cover section, character, content, practice, reflection, and author. Based on the results of validation experts concluded that the comic-based media folklore is considered feasible to be used with little revision indicated score 80. As a follow-up, E-Mikuta production can be developed both in terms of variety of content and variety of target levels so it can be useful as a medium of learning BIPA, as well as an inspiration for other researchers to develop other research.*

**Keywords:** *comics, E-Mikuta, pocket, vocabulary, BIPA*

## **PENDAHULUAN**

Seiring kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia di era global, perkembangan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di dunia internasional juga makin pesat. BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia bagi penutur asing yang terdiri atas mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Pada Kongres Bahasa Indonesia VI (1993), perkembangan BIPA di luar negeri dapat dilihat dari keterlibatan pemerintah dalam mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia di beberapa universitas, sekolah, bahkan lembaga-lembaga kursus. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya orang asing yang belajar dengan berbagai tujuan, antara lain, tujuan politik, ekonomi, perdagangan, seni budaya, wisata, dan pendidikan untuk kerja sama internasional. Pada saat ini terdapat lebih dari 72 negara yang memiliki program pembelajaran bahasa Indonesia di dalam dunia pendidikan.

Penyelenggaraan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing telah dilaksanakan oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, sejak tahun 2000. Kemudian, beberapa universitas di Indonesia dan lembaga kursus membuka ruang kelas untuk BIPA, salah satunya adalah Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Hal tersebut bertujuan memudahhi penutur asing untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan pengajar yang berkompeten. Mahasiswa BIPA Unesa berasal dari Jepang dan Korea Selatan. Namun, terbatasnya media pembelajaran BIPA menghambat pengembangan dan inovasi model pembelajaran. Keterbatasan pemahaman kosakata juga menjadi karakteristik mahasiswa BIPA sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang dapat memberikan stimulus positif dalam mempelajari kosakata.

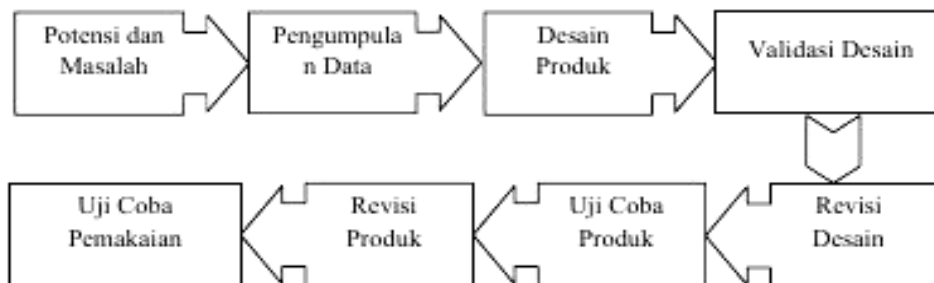
Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba membuat pengembangan model media pembelajaran untuk mendukung kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan pembelajaran. Media pembelajaran yang dikembangkan peneliti berupa komik elektronik. Komik elektronik dilengkapi dengan gambar sehingga dapat meningkatkan imajinasi dan memudahkan mahasiswa BIPA memahami cerita di dalamnya. Selain itu, komik elektronik juga dapat memanfaatkan teknologi yang ada di era modern saat ini.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik mengembangkan media komik elektronik dengan variasi baru berupa E-Mikuta yang bertema. Dalam penelitian ini, tema yang digunakan adalah tema dasar lingkungan alam sesuai dengan silabus BIPA, yaitu mahasiswa dapat membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Dalam hal ini mahasiswa mampu membaca dialog dalam komik elektronik; menulis kata-kata yang sulit, kemudian memahami artinya; berbicara dengan menceritakan kembali isi dialog dalam komik elektronik; dan mendengarkan pengajar dalam membahas apa saja yang ada di dalam komik elektronik tersebut. Cerita yang terdapat di dalam komik elektronik ini mengenai objek yang terdapat di sungai, hutan, pantai, dan sawah melalui percakapan dua orang di setiap objek lingkungan alam.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan proses pengembangan E-Mikuta sebagai bentuk media pembelajaran BIPA berbasis teknologi dan (2) mendeskripsikan kualitas E-Mikuta sebagai bentuk media pembelajaran BIPA berbasis teknologi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah pengembangan dengan metode R&D (*research and development*). Pada penelitian ini, model Sugiyono (2009) diadaptasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun tahapan yang ditempuh meliputi (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, dan (7) revisi produk. Untuk memudahkan pengaluran tahapan, dibuat bagan alur tahapan pengembangan R&D sebagai berikut.



**Bagan 1**  
**Alur Tahapan Pengembangan R&D Adaptasi Sugiyono (2009)**

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa BIPA Unesa level A2 yang berjumlah empat orang (dua pemelajar BIPA asal Jepang dan dua pemelajar BIPA asal Korea Selatan). Data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dianalisis dengan uji statistik deskriptif. Pada uji statistik deskriptif penelitian hanya menggambarkan keadaan data apa adanya. Data kualitatif dianalisis secara induktif.

## LANDASAN TEORI

Dalam dunia pendidikan, media pembelajaran sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Menurut Suryani dan Agung (2012: 136), media pembelajaran adalah alat bantu dan sarana yang membantu guru



menyampaikan materi kepada siswa dalam pembelajaran. Jenis media pembelajaran menurut Asyhar (2012: 44—46) dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu

1. media visual (melibatkan penglihatan),
2. media audio (melibatkan pendengaran),
3. media audio-visual (melibatkan penglihatan dan pendengaran),
4. multimedia (melibatkan penglihatan dan pendengaran melalui media teks, visual dan audio, serta media interaktif berbasis komputer serta teknologi komunikasi dan informasi).

Berdasarkan pemaparan mengenai jenis-jenis media pembelajaran, peneliti menggunakan media visual berupa komik elektronik sebagai model pengembangan pembelajaran untuk mahasiswa BIPA. Komik elektronik merupakan salah satu produk visual. Dalam peranannya sebagai media pembelajaran, komik elektronik bersifat fleksibel karena dapat digunakan untuk banyak tujuan (Setiawan, 2002: 21). Darmawan menyatakan, syarat komik, antara lain, meliputi 1) imaji yang disusun; 2) terletak dalam panel; 3) membentuk narasi; 4) terdapat simbol-simbol selain gambar, seperti balon kata, *caption*, efek bunyi, dan; 5) susunan panel dan/atau susunan imaji adalah tuturan khas komik (2012: 38).

Lebih lanjut, Sudjana dan Rivai mendeskripsikan komik sebagai bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan (2002: 64). Komik dapat meningkatkan imajinasi pembaca karena dilengkapi dengan gambar sehingga dapat memudahkan mahasiswa BIPA untuk memahami cerita yang terdapat di buku komik. Komik adalah serangkaian gambar yang termasuk dalam kotak yang berisi semua rangkaian cerita. Foto-foto itu biasanya dilengkapi dengan balon pidato dan disertai dengan narasi penjelasan (Shadely, 2003). Sementara itu, Trimo (2011) menggambarkan medium komik bisa dibagi menjadi dua, yaitu strip komik dan buku komik. Strip komik adalah bentuk yang terdiri atas beberapa lembar bingkai kolom yang diterbitkan di surat kabar atau majalah dan biasanya merupakan cerita yang terhubung, sedangkan buku komik yang dimaksud berbentuk buku. Buku komik tersebut berisi pesan melalui ilustrasi dan teks tertulis. Dalam penelitian pengembangan ini, peneliti menggunakan media pembelajaran e-komik.

Desain komik memerlukan unsur-unsur yang memudahkan dalam penyusunan. Unsur-unsur pembuatan komik adalah bahan atau komponen yang membentuk desain komik secara menyeluruh dalam suatu komposisi, tetapi dapat dipisah-pisah menjadi bagian yang lebih kecil.

Berikut ini adalah unsur-unsur desain dalam komik.

- 1) *Space*  
Komik memerlukan *space* (ruang), seperti kertas, ruang di media digital, atau media lainnya. *Space* atau ruang tertentu dibiarkan kosong pada panel tertentu agar pembaca merasakan “kelegaan” dan arahan karakter melakukan sesuatu.
- 2) *Image*  
*Image* berupa goresan tangan (*hand drawing* atau *free hand*).
- 3) *Teks*  
*Teks* adalah *image* dari lambang atau simbol dari suara dan angka.





- 4) *Point and Dot*  
*Point* (titik) tidak selalu harus bulat, boleh merupakan kotak kecil, segitiga kecil, elips kecil, bentuk bintang yang sangat kecil, dan bentuk-bentuk lainnya dalam ukuran kecil. *Dot* berbentuk lebih bulat kecil.
- 5) *Line*  
*Line* adalah gabungan dari beberapa *point* atau *dot* yang saling *overlapping* dan menyambung. *Line* tidak harus selalu lurus. Garis lurus disebut dengan nama *straight line*, garis lengkung disebut dengan nama *curve line*.
- 6) *Shape*  
*Shape* adalah bentuk dalam dua dimensi ukuran, yaitu X dan Y atau panjang dan lebar.
- 7) *Form*  
*Form* (wujud) adalah bentuk dalam tiga dimensi ukuran, yaitu X, Y, dan Z atau panjang, lebar, dan tinggi.
- 8) *Tone/value (gradient, lighting & shading)*  
*Tone* adalah tekanan warna ke arah lebih gelap atau lebih terang. *Gradient*, *lighting*, dan *shading* dapat pula dilakukan dengan cara arsir (*render*).
- 9) *Colour (hue)*  
Dari pembentukannya, *colour* terbagi menjadi tiga kelompok besar sebagai berikut.
  - a) *Light colour (visible spectrum)*, warna cahaya, terkadang sering disebut *additive colour*, dihasilkan dari tiga cahaya warna utama (*light primary colours*), yaitu *red* (merah), *green* (hijau), dan *blue* (biru) atau RGB.
  - b) *Transparent colour* (warna cat transparan), dihasilkan dari empat warna utama (*primary colours*), yaitu *cyan* (biru muda), *magenta (pink)*, *yellow* (kuning), dan *black* (hitam tidak solid atau abu-abu gelap) atau CMYK.
  - c) *Opaque colour* (warna tidak transparan), terdiri dari lima warna utama (*primary colours*) atau kadang-kadang disebut juga sebagai *subtractive colours*, yaitu warna putih, kuning, merah, biru, dan hitam.
- 10) *Pattern*  
*Pattern* atau pola dalam komik digunakan sebagai *screentone*.
- 11) *Texture*
- 12) *Voice, Sound, and Audio*

Media pembelajaran komik elektronik tersebut diterapkan pada mahasiswa BIPA Unesa level A2. BIPA adalah program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) membagi skala kemahiran berbahasa atas enam tingkat, yaitu A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Tingkat A1 merupakan peringkat kemahiran yang terendah dan C2 merupakan peringkat kemahiran tertinggi. Di Indonesia pada umumnya lembaga pengajaran BIPA membagi peringkat kemahiran atas tiga tingkat, yaitu dasar, madya/menengah, dan lanjut. Berdasarkan CEFR, tingkat dasar merujuk pada tingkat A1 dan A2, tingkat madya merujuk pada B1 dan B2, dan tingkat lanjut merujuk pada C1 dan C2.



## **PEMBAHASAN**

### **1. Proses Pengembangan E-Mikuta sebagai Bentuk Media Pembelajaran BIPA Berbasis Teknologi**

Tahapan-tahapan pengembangan R&D pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **a) Potensi dan Masalah**

Potensi yang muncul adalah makin berkembangnya program BIPA, salah satunya BIPA di Unesa. Namun, dalam kegiatan belajar-mengajar ditemukan adanya masalah, yaitu terbatasnya media pembelajaran BIPA, termasuk media pengajaran kosakata.

#### **b) Pengumpulan Data**

Peneliti mengidentifikasi jenis-jenis media pembelajaran kosakata yang sudah tersedia, kemudian menganalisis kekurangannya. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa mahasiswa BIPA menyukai pembelajaran kosakata baru dengan menggunakan gambar sehingga peneliti tertarik mengembangkan produk komik elektronik. Komik elektronik dikembangkan dengan mengaitkannya dengan salah satu materi yang ada dalam pembelajaran BIPA, yaitu mengenal lingkungan sekitar. Peneliti mencari berbagai referensi dalam pembuatan komik elektronik yang diusulkan, mulai dari penentuan tema, pembuatan skrip, pendesainan, serta pengilustrasian komik elektronik.

#### **c) Desain Produk**

Media pembelajaran komik elektronik untuk mahasiswa BIPA belum banyak dikembangkan. Desain produk disusun melalui proses diskusi kelompok terpumpun dengan tim pengajar dan sahabat BIPA Unesa. E-Mikuta memiliki spesifikasi penyajian dengan urutan sampul, tokoh, isi, latihan, dan refleksi. Selain itu, E-Mikuta didesain secara tematis sehingga lebih memudahkan pemelajar BIPA dalam memahami isi komik.

#### **d) Validasi Desain**

Produk E-Mikuta edisi lingkungan alam divalidasi oleh Bu Shendy (pengajar BIPA Unesa) dan Pak Hendro sebagai dosen desain Unesa dengan menggunakan instrumen lembar validasi produk E-Mikuta dari segi materi dan penyajian.

#### **e) Revisi Desain**

Setelah dilakukan uji validasi dengan para ahli, tim peneliti melakukan revisi sesuai dengan masukan yang diberikan.

#### **f) Uji Coba Produk**

Dilakukan uji coba E-Mikuta terhadap beberapa mahasiswa BIPA Unesa kemudian dibandingkan hasilnya dengan produk lama sebelum dimodifikasi, yaitu komik dengan percakapan yang tidak bertema. Produk E-Mikuta diuji coba pemakaiannya pada empat mahasiswa BIPA yang menjadi sasaran penelitian ini.

Dalam uji coba produk penelitian ini, tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mendapatkan respons positif dari pemelajar. Hal tersebut dibuktikan dengan efektifnya proses belajar-mengajar dalam kelas. Pengajar BIPA memperkenalkan sekaligus menerapkan pengembangan media pembelajaran E-Mikuta dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut.

- 1) Dosen membuka pertemuan dengan salam.
- 2) Dosen mengecek kehadiran mahasiswa.



- 3) Dosen menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan hari ini.
  - 4) Dosen membagikan komik elektronik kepada mahasiswa.
  - 5) Dosen menjelaskan komik elektronik yang dibagikan kepada mahasiswa.
  - 6) Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu mempelajari kosakata yang berkaitan dengan lingkungan alam kepada mahasiswa.
  - 7) Dosen bercerita tentang lingkungan alam kepada mahasiswa.
  - 8) Dosen melakukan tanya-jawab dengan mahasiswa tentang lingkungan alam.
  - 9) Dosen mempersilakan mahasiswa membaca komik elektronik per individu.
  - 10) Dosen mempersilakan mahasiswa membaca komik elektronik secara berpasangan.
  - 11) Dosen mempersilakan mahasiswa bercerita tentang lingkungan alam sesuai dengan pengalamannya.
  - 12) Dosen membagi mahasiswa sesuai dengan lingkungan alam yang terdapat dalam komik elektronik.
  - 13) Dosen mempersilakan mahasiswa menuliskan kosakata sesuai dengan bagian masing-masing.
  - 14) Dosen mempersilakan mahasiswa menjelaskan arti setiap kata yang ditemukan dalam komik elektronik.
  - 15) Dosen menjelaskan kosakata baru yang belum dimengerti oleh mahasiswa.
  - 16) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya.
  - 17) Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat kalimat sesuai dengan kosakata yang ditemukan secara acak.
  - 18) Dosen melakukan tanya-jawab tentang lingkungan alam secara acak.
  - 19) Dosen memberikan angket kepada mahasiswa tentang komik elektronik yang digunakan sebagai media pembelajaran.
  - 20) Dosen mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa atas perhatian dan kerja sama pada pertemuan hari ini.
  - 21) Dosen mengakhiri pertemuan dengan salam.
- g) Revisi Produk

Tahap akhir dari serangkaian proses pengembangan E-Mikuta adalah revisi. Perbaikan produk dilakukan terhadap E-Mikuta berdasarkan masukan dan saran yang diberikan oleh validator.

## **2. Kualitas E-Mikuta sebagai Bentuk Media Pembelajaran BIPA Berbasis Teknologi**

Untuk mengukur kualitas pengembangan E-Mikuta, peneliti menggunakan kevalidan dan keefektifan dalam pembelajaran pada mahasiswa BIPA Unesa. Kevalidan tersebut dapat diketahui berdasarkan penilaian validator materi, yaitu Bu Shendy Mega R. selaku pengajar BIPA Unesa. Validasi menghasilkan beberapa komentar dan saran perbaikan terhadap materi dalam komik elektronik tersebut. Dalam komik elektronik tersebut terdapat kata *asiik* yang dapat membingungkan mahasiswa yang seharusnya diubah menjadi kata baku *asyik*. Selain itu, terdapat kalimat yang membingungkan juga, yaitu *"Itu ada orang, tapi bukan orang"*, seharusnya diubah dengan kalimat *"Itu ada orang, tetapi tidak bergerak"*. Berdasarkan penilaian tersebut, pengembangan media pembelajaran komik elektronik ini mendapatkan nilai 80 dan memerlukan sedikit revisi untuk



mempermudah pemahaman mahasiswa dalam mempelajari kosakata menggunakan komik elektronik ini.

Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran tersebut, secara garis besar mahasiswa sangat terbantu dalam membaca dan memahami isi dialog dalam E-Mikuta meskipun masih belum lancar. Mereka memiliki keaktifan dalam proses belajar-mengajar. Mereka dapat menemukan kosakata yang sesuai dengan isi komik elektronik. Kosakata yang diperoleh mahasiswa BIPA berbeda-beda jumlahnya. Berikut adalah tabel penguasaan kosakata mahasiswa BIPA dengan menggunakan E-Mikuta.

**Tabel 1**  
**Penguasaan Kosakata dengan Menggunakan E-Mikuta**

Ko de	Asal	Jenis Lingkungan	Jumlah Kosakata	Kosakata Belum Tepat	Jumlah Kalimat	Kalimat Belum Tepat
Kr	Jepang	Sungai	12	2	9	3
As	Jepang	Sawah	9	0	7	4
He	Korea Selatan	Hutan	9	0	8	4
Yu	Korea Selatan	Pantai	10	0	6	2

Berdasarkan Tabel 1, mahasiswa berkode Kr (Kresna) dari Jepang dapat menemukan kosakata pada objek lingkungan alam berupa sungai sejumlah 12 kosakata dengan kesalahan sebanyak 2 kata. Mahasiswa berkode He (Heizel) dari Korea Selatan dapat menemukan kosakata pada objek lingkungan alam berupa hutan sejumlah 9 kosakata yang semuanya benar. Mahasiswa berkode As (Ashaha) dari Jepang dapat menemukan kosakata pada objek lingkungan alam berupa sawah sejumlah 9 kosakata yang semuanya benar. Mahasiswa yang berkode Yu (Yunita) dari Korea Selatan dapat menemukan kosakata pada objek lingkungan alam berupa pantai sejumlah 10 kosakata yang semuanya benar. Keempat mahasiswa tersebut rata-rata menemukan kosakata berjumlah kurang dari 15. Mereka dapat memahami arti kosakata yang ditemukannya. Namun, belum semua kosakata yang terdapat dalam komik elektronik dapat mereka temukan. Terdapat kosakata baru, seperti abrasi yang belum mereka ketahui dan merupakan kosakata baru bagi mereka.

Selain ditugaskan menemukan kosakata, untuk menambah keterampilan dan pemahaman dalam membuat kalimat, mahasiswa BIPA ditugasi membuat kalimat sesuai dengan kosakata yang diperoleh dari komik elektronik tersebut. Kalimat yang dapat mereka buat tidak lebih dari 10 kalimat. Kresna dapat membuat 9 kalimat, dengan kesalahan sebanyak 3 kalimat. Heizel dapat membuat 8 kalimat dengan kesalahan sebanyak 4 kalimat. Ashaha dapat membuat 7 kalimat dengan kesalahan sebanyak 4 kalimat. Yunita dapat membuat 6 kalimat dengan kesalahan sebanyak 2 kalimat.

Letak kesalahan kosakata dan kalimat yang mereka buat sebagian besar merupakan kata berimbuhan, terutama *me-*. Sebagai contoh, kesalahan kosakata oleh Kresna pada kata *mancing*. Kresna tidak menambahkan imbuhan *me-* padahal kata tersebut merupakan kata kerja sehingga seharusnya menjadi *memancing*. Begitu pula halnya dengan kalimat. Kesalahan dalam penyusunan kalimat sebagian besar terletak pada pengimbuhan *me-*. Sebagai contoh, pada kalimat yang disusun oleh Ashaha, yaitu *Dia lempar batu kepada pencuri* seharusnya terdapat imbuhan *me-* pada *lempar* menjadi *Dia melempar batu*



kepada pencuri. Sementara itu, pada kalimat yang disusun oleh Kresna, yaitu *Saya lihat batu yang besar* seharusnya terdapat imbuhan *me-* pada *lihat* menjadi *Saya melihat batu yang besar*. Pada kalimat yang disusun oleh Heizel, yaitu *Saya kaget karena saya lihat orang-orangan* seharusnya terdapat imbuhan *me-* pada *lihat* menjadi *Saya kaget karena saya melihat orang-orangan*. Pada kalimat yang disusun oleh Yunita, yaitu *Kalau berkemah harus main BBQ* seharusnya terdapat imbuhan *ber-* pada *main* menjadi *Kalau berkemah harus bermain BBQ*. Berdasarkan kasus tersebut, diketahui bahwa mahasiswa BIPA belum memahami betul tentang imbuhan. Mereka belum memahami kapan imbuhan tersebut digunakan, untuk apa imbuhan tersebut digunakan, dan apa arti penggunaan imbuhan tersebut. Kebanyakan mereka menuliskannya dengan kata dasarnya tanpa menambahkan imbuhan apabila kata itu merupakan kata kerja.

Skor dan nilai yang mereka peroleh pada pembelajaran menggunakan komik elektronik ini sama, yaitu 11 dan 69. Namun, jumlah kosakata dan kalimat yang mereka temukan dan buat tidak sama. Selain itu, jumlah kesalahan dari pengerjaan mereka juga tidak sama.

Keefektifan tersebut dapat diketahui berdasarkan respons mahasiswa dalam proses belajar-mengajar, yaitu kelancaran mahasiswa dalam membaca dialog dalam komik, baik secara individual maupun berpasangan; kelancaran bercerita mahasiswa dalam menceritakan pengalamannya mengenai lingkungan alam yang mereka ketahui; serta seberapa banyak jumlah kosakata dan kalimat yang mereka peroleh dan mereka susun. Kepraktisan tersebut dapat dilihat berdasarkan perwujudan E-Mikuta sendiri, yaitu berbentuk saku sehingga mudah dibawa ke mana-mana. Di samping itu, isi cerita di dalamnya sederhana, tetapi terdapat banyak kosakata yang bermanfaat bagi mahasiswa untuk perbendaharaan kosakata mereka.

Setelah pembelajaran selesai, angket berupa Google Form mengenai produk E-Mikuta dan proses pembelajaran menggunakan E-Mikuta dibagikan kepada mahasiswa. Dari aktivitas tersebut diperoleh hasil bahwa mereka baru pertama kali menggunakan komik elektronik sebagai media pembelajaran. Mereka sangat antusias dalam proses belajar-mengajar serta sangat bersemangat dan senang menggunakan E-Mikuta sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Mengenai produk E-Mikuta sendiri, pada saat uji coba mereka memberikan penilaian terhadap ukuran tulisan yang terlalu kecil sehingga menyulitkan mereka dalam membaca. Oleh karena itu, E-Mikuta akan direvisi setelah mendapat penilaian dan masukan-masukan dari mahasiswa dan validator. Mahasiswa BIPA sangat setuju apabila E-Mikuta dikembangkan menjadi media pembelajaran dalam proses belajar-mengajar mereka.

## **PENUTUP**

Dalam pengembangan media pembelajaran, peneliti menggunakan media E-Mikuta edisi lingkungan alam. Mahasiswa dituntut dapat membaca dialog dan isi E-Mikuta secara individual maupun berpasangan; menemukan kosakata pada objek pantai, hutan, dan sungai; serta membuat kalimat berdasarkan kosakata yang ditemukan. Mereka dapat menemukan tidak lebih dari 15 kosakata dan dapat membuat tidak lebih dari 10 kalimat. Kresna dapat menemukan kosakata sejumlah 12 dan dapat membuat kalimat sejumlah 9. Heizel dapat menemukan kosakata sejumlah 9 dan dapat membuat kalimat sejumlah 8. Ashaha dapat menemukan



kosakata sejumlah 9 dan dapat membuat kalimat sejumlah 7. Yunita dapat menemukan kosakata sejumlah 10 dan dapat membuat kalimat sejumlah 6. Sebagian besar kesalahan yang mereka buat terletak pada kata berimbuhan. Mereka belum bisa menempatkan imbuhan pada kata kerja.

Pengembangan E-Mikuta ini mendapatkan penilaian dari mahasiswa BIPA dan validator. Pengembangan E-Mikuta ini memiliki peluang keberhasilan ke depannya sebagai media pembelajaran BIPA karena memiliki kevalidan dan keefektifan dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyhar, Rayandra. (2012). *Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran*. Jakarta: Referensi Jakarta.
- Bagi Penutur Asing (Bipa): Kajian Bahasa-Antara*. Litera. Volume 14, Nomor 1.
- Buchoni dan Setyawati. (2015). "Development Learning Model of Charactereducation Through." *International Journal of Education and Research*. Vol. 3 No. 9, September.
- Danaswari, Resti Wahyu. (2012). *Pengembangan Bahan Ajar dalam Bentuk Media Komik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMAN 9 Cirebon*. Skripsi. Cirebon: Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Nurjati.
- Darmawan, Hikmat. (2012). *How To Make a Comic*. Jakarta: Plotp.
- Fauziyyah, Desti. (2013). *Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Kecerdasan Jamak dalam Pembelajaran Inkuiri untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Cerita Pendek di SMA Daarul Quran Bandung*. Bandung: UPI.
- Hayuwari, Deashara. (2016). *Pengembangan Media Pembelajaran Komik Foto untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas XI Program Studi Akuntansi SMK Negeri 1 Godean Tahun Ajaran 2015/2016*. Skripsi. Yogyakarta: FE UNY.
- Kusmiatun, Ari. (2016). *Mengenal BIPA dan Pembelajarannya*. Yogyakarta: K Media.
- Ramliyana, Randi. (2016). *Media Komik sebagai Upaya Peningkatan Penguasaan Kosakata dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)*. Riksa Bahasa. Volume 2, Nomor 2.
- Santyasa, I Wayan. (2007). *Landasan Konseptual Media Pembelajaran*. Tersedia: [http://www.freewebs.com/santyasa/pdf2/Media\\_Pembelajaran.pdf](http://www.freewebs.com/santyasa/pdf2/Media_Pembelajaran.pdf)[17 April 2010].
- Setiawan, M.N., (2002). *Menakar Panji Koming: Tafsiran Komik Karya Dwi Koendoro pada Masa Reformasi 1998*. Jakarta: Kompas.
- Shadily, T. H. (2013). *Comic Learning*. (online). <http://manusiapurbaa.wordpress.com/tag/komik-pembelajaran/>
- Sudjana, Nana & Ahmad Riva'i. (2002). *Media Pengajaran*. Bandung: PT Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsono. (2015). *Pemerolehan Klausa Relatif pada Pemelajar Bahasa Indonesia*.
- Suryani, Nunuk dan Leo Agung. (2012). *Strategi Belajar Mengajar*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Prima Vidya Asteria  
Judul Makalah : “E-Mikuta (Komik Saku Kosakata Elektronik): Media Pembelajaran BIPA Berbasis Teknologi”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 08.00—09.30  
Moderator : Dr. Syarifuddin, M.Hum.  
Pencatat : 1. Elvi Suzanti  
2. Inayatushalihah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Perkembangan BIPA makin pesat, tetapi di lapangan masih banyak ditemukan kendala, salah satunya keterbatasan media pembelajaran. Menarik atau tidaknya pelajaran BIPA di kelas bergantung pada media pembelajaran yang digunakan. Hal itu melatarbelakangi penulis mengembangkan media komik elektronik untuk kegiatan belajar-mengajar.
2. Komik elektronik dapat meningkatkan imajinasi pembaca karena dilengkapi dengan gambar sehingga dapat memudahkan mahasiswa BIPA memahami cerita di dalamnya. Komik elektronik merupakan salah satu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
3. Tim BIPA Unesa mencoba mengembangkan media pembelajaran berupa komik yang disebut E-Mikuta, sebuah komik saku kosakata elektronik. Tema E-Mikuta adalah lingkungan: pantai, sungai, sawah, dan hutan.
4. Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan E-Mikuta adalah tokohnya yang masih anak-anak atau remaja sebaiknya menggunakan bahasa bahasa gaul atau bahasa baku.
5. Langkah pembelajaran BIPA dengan media E-Mikuta, antara lain, adalah (1) pengajar membagikan E-Mikuta kepada mahasiswa; (2) pengajar menyampaikan tujuan pembelajaran, yakni kosakata yang berkaitan dengan lingkungan; (3) pengajar bercerita dan melakukan tanya-jawab tentang lingkungan; (4) mahasiswa membaca E-Mikuta secara berpasangan, lalu bercerita tentang lingkungan sesuai dengan pengalamannya; (5) mahasiswa menuliskan dan menjelaskan arti kosakata yang ditemukan dalam *e*-komik; (6) pengajar menjelaskan kosakata baru yang belum dimengerti mahasiswa; (7) mahasiswa menyusun kalimat dengan kosakata itu.
6. Hal yang menarik ketika mahasiswa belajar dengan E-Mikuta adalah mahasiswa BIPA menyebutkan kosakata yang tidak terdapat di dalam E-Mikuta.
7. Mahasiswa BIPA sangat terbantu dalam membaca dan memahami isi dialog dalam E-Mikuta dan memiliki keaktifan dalam proses belajar-mengajar.
8. E-Mikuta masih perlu dikembangkan karena memiliki peluang keberhasilan sebagai media pembelajaran.
9. Pengembangan media komik elektronik tematik lainnya sebagai media pembelajaran BIPA perlu dilakukan.



## **Tanya Jawab**

### **Penanya 1**

Nama : Maulida

Instansi : IAIN Tulungagung

### **Pertanyaan:**

IAIN Tulungagung tidak memiliki BIPA sehingga mahasiswa asing yang berasal dari Thailand mengalami kesulitan dalam pembelajaran di kampus. Badan Bahasa hendaknya dapat menjembatani supaya mahasiswa asing yang akan kuliah di Indonesia harus lulus tes UKBI.

### **Jawaban:**

Penelitian ini merupakan penelitian berkala sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan. Perlu dilaksanakan diskusi dengan universitas lain yang melaksanakan BIPA. Mudah-mudahan untuk ke depannya IAIN Tulungagung dapat membuka kelas BIPA seperti universitas lainnya.

### **Penanya 2**

Nama : Nurmayani

Instansi : Nusa Tenggara Barat

### **Pertanyaan:**

Apakah E-Mikuta diberlakukan di kelas pembelajaran kosakata? Apakah E-Mikuta berdampingan dengan modul yang digunakan?

### **Jawaban:**

E-Mikuta menjadi materi utama dalam pembelajaran kosakata dan menjadi materi tambahan pada kompetensi dasar lainnya.

### **Penanya 3**

Nama : Putu Sutrisna

Instansi : STIKES Denpasar

### **Pertanyaan:**

Bagaimana teknis pelaksanaan E-Mikuta?

### **Jawaban:**

Tahapan pelaksanaan pembelajaran menggunakan E-Mikuta meliputi, antara lain, mahasiswa membaca E-Mikuta secara berpasangan; tiap mahasiswa memilih lingkungan alam dalam E-Mikuta yang diminati; mahasiswa menuliskan kosakata terkait dengan alam sesuai dengan pilihan masing-masing dan menjelaskan arti kosakata yang ditemukan dalam E-Mikuta; mahasiswa dan dosen berdiskusi tentang kesulitan yang dialami; dan mahasiswa diminta menyusun kalimat untuk setiap kosakata yang ditemukan. Kami akan menjual komik ini disertai langkah-langkah pembelajarannya. Modul belum kami kembangkan.



**Penanya 4**

Nama : Junaiyah H.M.

Instansi : Lampung

**Pertanyaan:**

Mikuta Elektronik atau E-Mikuta? Silakan lihat kembali kamus, apa makna *learning* itu pembelajaran atau pemelajaran.

**Jawaban:**

Mikuta elektronik. Merek kami itu Mikuta.

**Penanya 6**

Nama : Ambar

Instansi : Universitas Islam Negeri Malang

**Pertanyaan:**

Apakah tidak lebih baik apabila desain tokoh dalam E-Mikuta adalah anak Indonesia, bukan karakter Manga? Jika kelasnya merupakan campuran yang kemampuannya berbeda, apakah datanya tidak dipilah? Apakah hal itu tidak menyebabkan bias?

**Jawaban:**

1. Kami akan membuat tema lain yang lebih tampak keindonesiaannya.
2. Untuk kelas campuran, tidak diberikan materi yang sulit.
3. Kami menyajikan pilihan materi lebih dari satu sehingga apabila sudah menyelesaikan satu materi, pemelajar dapat melanjutkan ke materi lain yang disukai.

**Isu-Isu Penting:**

1. Perlu dibuat peraturan mengenai kewajiban mengikuti tes UKBI bagi mahasiswa asing yang akan melanjutkan studi di Indonesia.
2. Kebudayaan lokal yang dijadikan materi dalam literasi digital tidak terbatas pada kearifan lokal daerah tertentu, tetapi dapat mencakup kearifan lokal daerah lain.
3. Kemajuan teknologi digital dapat digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia dan literasi.



## 9. Korpus Beranotasi: Ke Arah Pengembangan Korpus Bahasa-Bahasa Indonesia

### KORPUS BERANOTASI: KE ARAH PENGEMBANGAN KORPUS BAHASA-BAHASA DI INDONESIA

*Annotated Corpus: Toward Development of Language Corpora in Indonesia*

**Totok Suhardijanto<sup>a</sup>, Arawinda Dinakaramani<sup>b</sup>**

<sup>a,b</sup>Universitas Indonesia

totok.suhardijanto@ui.ac.id; arawinda.dinakaramani@ui.ac.id

#### Abstrak

Meskipun dikenal sebagai negara dengan keragaman bahasa dan budaya terbesar kedua di dunia setelah Papua Nugini, ironisnya Indonesia juga dikenal sebagai negara yang minim sumber daya bahasa elektronis. Etnolog, Simons dan Fennig (2018) menyebutkan bahwa terdapat 719 bahasa daerah di Indonesia yang tentu saja akan memakan waktu dan biaya untuk membangun sumber daya bahasa (SDB) untuk kesemuanya. Dalam makalah ini disajikan upaya pembangunan SDB untuk bahasa-bahasa di Indonesia dengan mengutamakan pengembangan korpus beranotasi pada bahasa-bahasa utama. Pada fase pertama, dalam SDB yang dibangun, dikembangkan korpus bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa dipilih sebagai proyek perintis karena bahasa tersebut merupakan salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di Indonesia, yaitu 84,3 juta orang. Sementara itu, bahasa Indonesia dipilih karena posisinya sebagai bahasa nasional dan juga *lingua franca* di Indonesia. Data yang digunakan untuk mengembangkan korpus ini—pada tahap awal—difokuskan pada teks tertulis dengan mempertimbangkan keragaman variasi bahasa tulis yang ada di Indonesia. Dalam makalah ini disampaikan apa saja yang selama ini menjadi tantangan, apa yang telah dicapai, dan apa yang menjadi tujuan pengembangan pada masa yang akan datang.

**Kata-kata kunci:** sumber daya bahasa, korpus beranotasi, bahasa Jawa, bahasa Indonesia/Melayu

#### Abstract

*Although considered as the second most linguistically-diverse country, Indonesia is ironically also known as a country with many under-resourced languages. This paper presents our attempt to develop language resources for languages of Indonesia. Since there are 719 indigenous languages in Indonesia, it would be very time-consuming and costly to develop LR for all Indonesian indigenous languages. On that account, the initial phase will focus only on major languages. From these major language, Javanese and Indonesian are chosen for our pilot project. Javanese is one of the most important language with the largest number of speakers in Indonesia. With the total number of speakers reaching 84.3 million people, Javanese is regarded as the twelfth most spoken language in the world. Indonesian is chosen due to its national language status and widely has been known as a lingua franca in the insular region of Southeast Asian. This paper discusses the drawbacks and opportunities in our attempt to build a Javanese annotated-corpus that is publicly accessible. At the first phase, we have developed*



*the database system and architecture for Javanese corpus building. In this paper, we also discuss the criteria for corpus building and the design for web-based corpus management and query application.*

**Keywords:** *language resources, annotated corpus, Javanese, Indonesian*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia tercatat sebagai negara kedua di dunia dalam hal kekayaan bahasanya. Namun, dalam ketersediaan sumber daya bahasa (*language resources*), Indonesia masih sangat tertinggal (Riza 2008). Kompleksitas situasi kebahasaan di Indonesia bisa jadi merupakan salah satu faktor yang menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya bahasa (SDB). Selama ini situasi kebahasaan di Indonesia dirangkul ke dalam tiga kategori: bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing. Menurut Riza (2008), pembangunan sumber daya bahasa untuk bahasa-bahasa di Indonesia pada umumnya terfokus pada pembangunan sumber daya bahasa untuk bahasa nasional (bahasa Indonesia). Lauder (2016) menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan hal itu adalah masalah keterbatasan dana dalam pembangunan sumber daya bahasa di Indonesia yang bersumber dari masih kurangnya perhatian pemerintah Indonesia menyangkut kondisi dan kedudukan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Prioritas pembangunan pemerintah Indonesia masih tertumpu pada pembangunan di bidang ekonomi dan politik.

Perencanaan dan pengembangan bahasa di Indonesia masih difokuskan pada bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Lauder (2016) menyatakan bahwa bahasa daerah sudah dibuatkan undang-undang tersendiri yang secara eksplisit menggambarkan situasi keterancaman bahasa daerah, tetapi pedoman kebijakan yang dapat mengatasi masalah ini pada tingkat operasional belum tersedia. Hal ini pulalah yang menyebabkan mengapa penelitian dan pembangunan sumber daya bahasa-bahasa daerah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan sejak situasi yang disampaikan oleh Riza (2008) sepuluh tahun silam.

Lauder (2016) menyatakan, dari 719 bahasa-bahasa di Indonesia, 706 bahasa merupakan bahasa yang masih digunakan penuturnya, sedangkan 13 bahasa merupakan bahasa yang tergolong ke dalam kategori terancam punah. Bahasa-bahasa daerah di Indonesia beragam dalam tipe bahasa dan hal jumlah penuturnya. Dari segi tipe bahasanya, bahasa-bahasa Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar: bahasa-bahasa Austronesia dan non-Austronesia. Bahasa-bahasa Austronesia tersebar di wilayah barat dan timur Indonesia, sedangkan bahasa-bahasa non-Austronesia hanya tersebar di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara yang semuanya terletak di wilayah timur Indonesia. Jika dilihat dari jumlah penuturnya, 386 bahasa dituturkan oleh sekitar 5.000 orang; 233 bahasa dituturkan oleh sekitar 1.000 orang; 169 bahasa dituturkan oleh sekitar 500 orang; dan 52 bahasa dituturkan oleh sekitar 100 orang (Gordon 2005). Sementara itu, menurut Simons dan Fennig (2018), hanya ada 20 bahasa yang dituturkan oleh lebih dari 1 juta orang, termasuk di dalamnya bahasa Jawa dengan jumlah penutur 84,3 juta.



## LANDASAN TEORI

### 1. Sumber Daya Bahasa

Jika kita melihat perkembangan sumber daya bahasa di Indonesia hingga saat ini, pada umumnya pembangunannya masih bersifat sporadis. Pengembangan korpusnya dilakukan untuk keperluan individual. Menurut Suhardijanto (2016), meskipun banyak pusat penelitian melakukan pembangunan sumber daya bahasa yang berfokus pada bahasa Indonesia, pada umumnya sumber daya tersebut dibangun untuk kebutuhan terbatas, yakni penelitian atau proyek individual. Kerja sama dan kolaborasi antarlembaga di Indonesia dalam pembangunan sumber daya bahasa boleh dikatakan belum terbangun dengan baik. Meskipun demikian, pada tahun-tahun terakhir ini, ada upaya ke arah kolaborasi yang dijumpai oleh organisasi profesi peneliti di bidang linguistik komputasional dan pemrosesan bahasa alami.

Sebelumnya, akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang disebut dengan sumber daya bahasa dan apa perbedaannya dengan korpus. Menurut European Language Resources Association (ELRA), istilah sumber daya bahasa (SDB) atau *language resources* merujuk pada set data dan deskripsi bahasa dalam bentuk yang terbaca oleh mesin. Data tersebut digunakan, secara khusus, untuk membangun, meningkatkan, atau mengevaluasi bahasa manusia, algoritme, atau sistem wicara, sedangkan serta secara umum, sebagai sumber daya utama bagi pelokalan peranti lunak dan industri pelayanan bahasa, pengkajian kebahasaan, transaksi internasional penerbitan elektronik, serta area spesialis subjek dan pengguna produk akhir. Contoh dari SDB adalah korpus lisan dan tulis; pangkalan data leksikon; tata bahasa; pangkalan data peristilahan; alat peranti dasar untuk pemerolehan, penyiapan koleksi, pengelolaan, pengaturan, dan penggunaan data kebahasaan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akhir-akhir ini perkembangan dalam SDB terjadi di Indonesia melalui munculnya Kateglo (<http://kateglo.com/>), Tesaurus Tematis (<http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/>), KBBI Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>), dan beberapa kamus berbasis jejaring lainnya. Meskipun demikian, dalam hal korpus elektronik dapat dikatakan belum ada SDB yang dapat diakses oleh masyarakat. Kalaupun ada, penyedia dan pengembangnya adalah pihak asing. Sebut saja Malay Concordance (<http://mcp.anu.edu.au/>), Korpus Leipzig ([http://corpora.uni-leipzig.de/en?corpusId=ind\\_mixed\\_2013](http://corpora.uni-leipzig.de/en?corpusId=ind_mixed_2013)), Korpus Bahasa Indonesia SEAlang (<http://sealang.net/indonesia/corpus.htm>), Korpus Bahasa Jawa SEAlang (<http://sealang.net/java/corpus.htm>), dan SketchEngine (<https://www.sketchengine.eu/>).

Dalam makalah ini dibahas pembangunan sumber daya bahasa-bahasa di Indonesia yang sedang kami kerjakan dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, kami memilih bahasa Jawa dan bahasa Indonesia karena dua alasan. Alasan pertama adalah, dari segi jumlah penutur, bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang utama di Indonesia. Sementara itu, bahasa Indonesia kami pilih karena statusnya sebagai bahasa nasional. Alasan kedua ialah dari segi dokumentasi, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia—dalam hal ini sebagai lanjutan dari bahasa Melayu—merupakan bahasa yang mempunyai tradisi tulis yang panjang di Indonesia. Dengan demikian, hal itu akan memudahkan tahap pengumpulan data.



Selanjutnya, pembangunan sumber daya bahasa ini mempunyai tiga tujuan. Tujuan pertama adalah menyediakan sumber daya bahasa nusantara yang berupa korpus beranotasi yang dapat dimanfaatkan oleh para peneliti dan pengembang aplikasi. Pada tahap awal, anotasi yang akan dikembangkan adalah sistem anotasi kelas kata (*part of speech (POS) tagging system*) untuk bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Tujuan kedua adalah menemukan model pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sumber daya bahasa bagi bahasa-bahasa daerah lain di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Tujuan ketiga adalah mendukung upaya pelestarian bahasa daerah di Indonesia yang saat ini terus mengalami tekanan, baik karena bahasa nasional maupun karena bahasa asing, misalnya bahasa Inggris.

## 2. Perihal Korpus

Pada saat ini korpus—atau linguistik korpus—sering diasosiasikan dengan peranti komputer dan teknik analisis yang menggunakan komputer untuk mengkaji data bahasa. Menurut McEnery dkk. (2005: 4), istilah korpus bukan hal baru di dalam sejarah kajian linguistik, paling tidak sudah ada sebelum tahun 1950-an. Namun, dalam perkembangannya, korpus baru menjadi isu kembali setelah pelibatan komputer modern dalam pengelolaannya sejak tahun 1980-an.

Pengertian korpus sendiri, menurut Sinclair (2005: 19), adalah *a collection of pieces of language text in electronic form, selected according to external criteria to represent, as far as possible, a language or language variety as a source of data for linguistic research*. Jadi, ada penekanan pada “bentuk elektronik” atau “terbaca oleh mesin” (*machine readable*) tentang korpus di era modern. Itulah yang membedakannya dengan korpus pada masa-masa sebelumnya.

Selain terkait dengan bentuk elektronik, pelibatan komputer modern juga telah mengubah jangkauan dan cakupan korpus. Jika sebelumnya jumlah korpus terbatas karena keterbatasan manusia dalam mengoleksi dan mengelola korpus, dengan adanya komputer, kedua hal tersebut tidak lagi menjadi isu yang membutuhkan perhatian lagi. Kehadiran komputer memungkinkan korpus berbentuk multimedia, tidak hanya berbentuk teks.

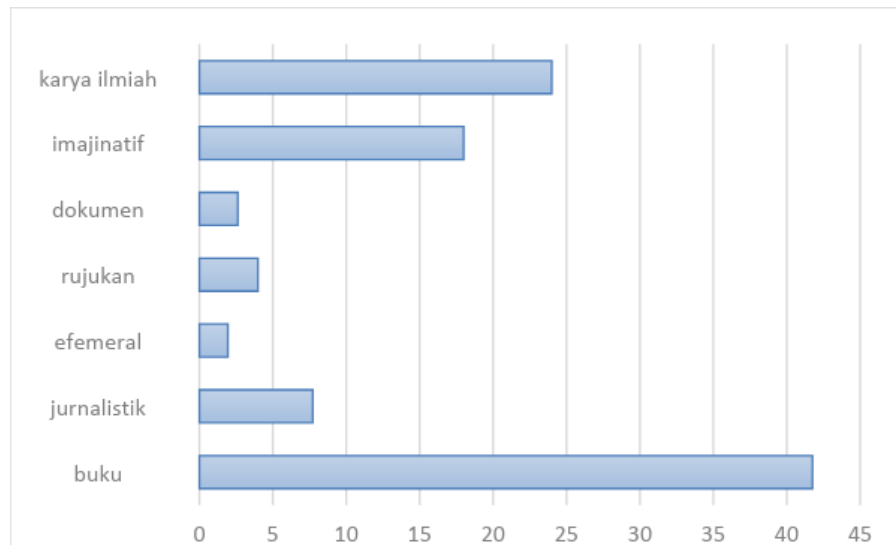
Ketika merancang korpus, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti, yakni kriteria pemilihan, ukuran korpus, keautentikan data, media penyimpanan, dan manipulasi data. Untuk menenukan kriteria pemilihan, peneliti menentukan apa yang menjadi tujuan utama dalam penyusunan korpus. Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, penyusunan korpus ini merupakan bagian dari upaya pembangunan SDB di Indonesia. Jadi, korpus yang dihasilkan adalah korpus umum yang dapat digunakan untuk segala macam keperluan sehingga sedapat mungkin mewakili berbagai jenis teks atau genre. Oleh karena itu, dalam perancangan korpus ini, peneliti membagi data kebahasaan menjadi tujuh kategori yang meliputi (1) karya imajinatif, (2) karya jurnalistik, (3) buku, (4) karya akademik, (5) efemeral, (6) dokumen, dan (7) rujukan

Yang termasuk dalam kategori karya imajinatif adalah puisi, prosa, cerpen, naskah drama, naskah skenario, dan sebagainya. Semua terbitan yang digolongkan ke dalam karya jurnalistik meliputi surat kabar, majalah, dan tabloid, baik daring maupun cetak. Selain itu, yang masuk ke dalam kategori buku, antara lain, adalah buku pelajaran, buku teks, buku sekolah elektronik, dan buku bacaan umum.



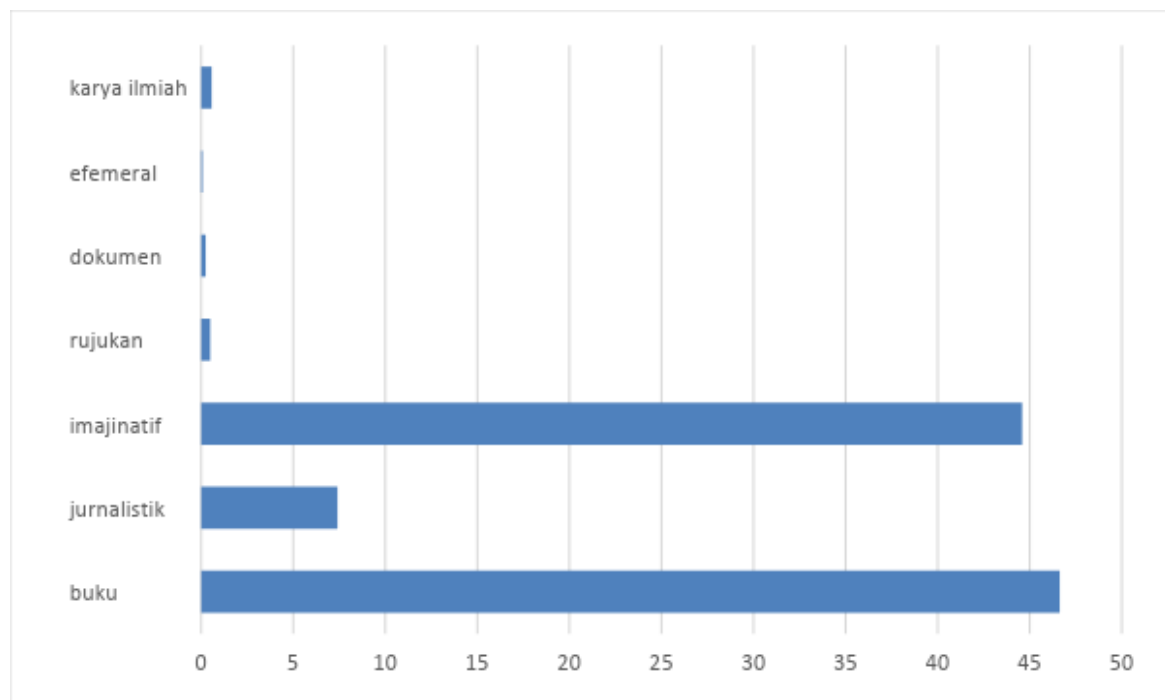
Untuk kategori karya ilmiah, termasuk di dalamnya meliputi artikel jurnal, makalah dalam prosiding, laporan penelitian, proposal penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam kategori efemeral adalah teks cetakan atau digital dengan masa berlaku singkat, misalnya brosur, pamflet, *leaflet*, poster, kartu undangan, dan kartu ucapan. Untuk kategori dokumen, termasuk di dalamnya adalah surat-menyurat, dokumen negara, undang-undang, dan sebagainya. Termasuk dalam kategori rujukan ialah ensiklopedia, wikipedia, kamus, dan tesaurus.

Komposisi ketujuh kategori tersebut dalam korpus bahasa Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 1**  
**Korpus Bahasa Indonesia**

Sementara itu, komposisi korpus bahasa Jawa setakat ini dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2**  
**Genre dalam Korpus Bahasa Jawa**

Selain kategori teks, sebagaimana dalam British National Corpus (BNC), pada korpus ini juga dipertimbangkan subjek atau bidang sebagai kategori konten korpus. Ada beberapa subjek yang menjadi kategori konten data pada korpus ini, yakni ilmu pengetahuan alam, ilmu terapan, sosial kemasyarakatan, hubungan internasional, perdagangan dan keuangan, seni, kepercayaan dan pemikiran, urusan global, serta gaya hidup. Meskipun demikian, korpus yang masih dalam tahap perkembangan ini masih memiliki subjek atau topik yang belum lengkap terkait dengan kategori konten data. Pelengkapannya akan dilakukan seiring dengan pengembangan korpus dari segi ukuran.

Bagaimana dengan ukuran korpus? Pertanyaan tersebut sejatinya belum dapat dijawab saat ini karena korpus sedang terus dikembangkan, baik dari segi kualitas dan kuantitas data, maupun dari segi kepraktisan penyimpanan dan pengelolaan. Paling tidak, pada saat ini data korpus bahasa Jawa telah terkumpul sebanyak 2,5 juta token. Sementara itu, data korpus bahasa Indonesia telah terkumpul sebanyak lebih dari 18 juta token.

Dari segi keautentikannya, materi yang digunakan sebagai data korpus merupakan bahan yang memang nyata digunakan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi, tidak ada materi yang dibuat khusus untuk melengkapi korpus ini. Sementara itu, dari segi penyimpanan, semua data dialihbentukkan dalam format digital, khususnya berkas teks (berkas dengan ekstensi *.txt*) dengan pengodean (*encoding*) UTF-8. Pada saat ini, semua data disimpan di dalam peladen (*server*) Universitas Indonesia. Terkait dengan manipulasi data, untuk mengakses dan mengelola data korpus dibangun sistem aplikasi korpus berbasis



jejaring. Aplikasi tersebut tergolong ke dalam *corpus query system* (CQS) atau *query management system* (QMS). Contoh *corpus management system* yang terkenal, antara lain, adalah *Antconc*, Anthony (2006); *SketchEngine*, Kilgarrif *et al.* (2014); dan *WordSmith*, Scott (2016). Sistem manajemen korpus yang kami kembangkan diberi nama Korpus Universitas Indonesia. Perihal aplikasi korpus tersebut dibahas secara detail pada bagian berikut.

## PEMBAHASAN

### 1. Aplikasi Manajemen Korpus

Pengembangan aplikasi Korpus Universitas Indonesia dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan kebutuhan (*requirement gathering*). Pada tahap pertama semua kebutuhan, informasi, dan data awal (*initial data*) yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi digali dan dikumpulkan. Selain yang terkait dengan pengembangan aplikasi secara langsung, pada tahap pertama ini ditentukan pula desain korpus bahasa Jawa yang akan menjadi konten dalam aplikasi Korpus Universitas Indonesia. Dari segi struktur internal korpus, secara garis besar data bahasa Jawa yang dikumpulkan terdiri atas data tulis dan data lisan.

Aplikasi Korpus Universitas Indonesia diharapkan mempunyai sejumlah fitur. Beberapa fitur dapat diakses tanpa *login* dan beberapa lainnya hanya dapat diakses jika pengguna *login* ke dalam aplikasi. Contoh fitur yang dapat diakses oleh pengguna tanpa *login* adalah fitur untuk menampilkan hasil pencarian kata dari korpus dalam bentuk konkordansi (*concordance*) dan fitur untuk menampilkan daftar frekuensi kata (*word list*) dari korpus. Contoh fitur yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang *login* ke dalam aplikasi adalah fitur untuk mengelola korpus dan fitur untuk menyumbang data ke dalam korpus. Tahap kedua adalah analisis data awal (*initial data analysis*), tahap ketiga adalah perancangan pangkalan data (*database*), dan tahap keempat adalah perancangan aplikasi berbasis jejaring.

### 2. Data Awal

Data awal korpus yang akan diunggah ke dalam aplikasi telah disediakan pada tahap pertama, yaitu pada tahap pengumpulan kebutuhan. Data awal korpus berupa kumpulan berkas teks (.txt). Setiap berkas berisi teks berbahasa Jawa yang telah dianotasi secara manual dengan memberi tambahan metadata menggunakan format bahasa pemarkah (*markup language*).

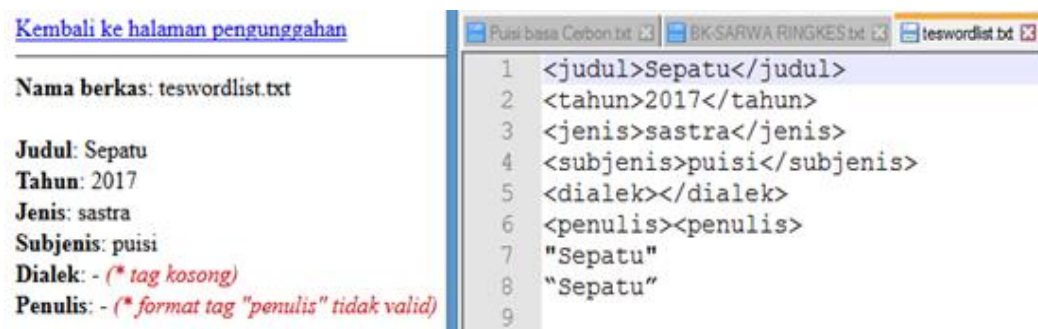
Data awal korpus yang diperoleh pada tahap pengumpulan kebutuhan kemudian dianalisis pada tahap kedua. Analisis dilakukan terutama untuk mengetahui label metadata apa saja yang ada di data awal. Hasil analisis akan digunakan sebagai dasar perancangan pangkalan data dan aplikasi jejaring.

Untuk melakukan analisis data awal, kami membuat aplikasi sederhana berbasis jejaring yang bernama Validator Berkas Korpus (*Corpus File Validator*). Fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Validator Berkas Korpus adalah fitur unggah berkas teks, fitur validasi label metadata, fitur untuk menampilkan metadata dari berkas teks yang diunggah, fitur untuk menampilkan daftar kata dan frekuensi kemunculan tiap-tiap kata dari berkas teks yang diunggah, dan fitur untuk menampilkan keseluruhan isi teks dari berkas yang diunggah. Semua fitur yang

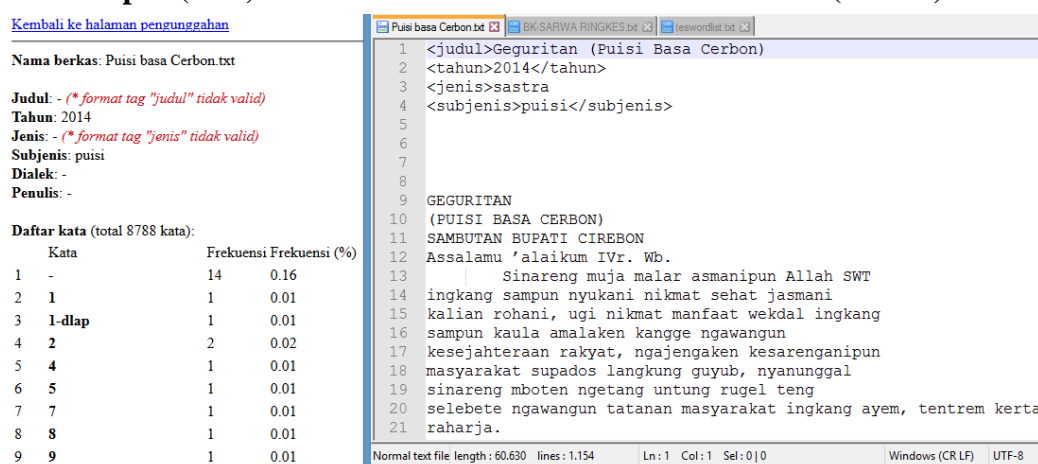


ada di aplikasi Validator Berkas Korpus akan disertakan dalam aplikasi Korpus Universitas Indonesia.

Dalam proses analisis data awal, ada beberapa masalah yang ditemukan di data awal. Pertama, ada berkas teks yang formatnya rusak sehingga berkas teks tersebut tidak dapat dibuka dan dibaca. Kedua, ada berkas teks yang nama berkasnya terlalu panjang sehingga berkas teks tersebut tidak dapat dibuka di komputer. Ketiga, format pengodean berkas teks tidak seragam, ada berkas teks yang berformat UTF-8 dan ada yang berformat ANSI. Keempat, ada label metadata yang kosong, misalnya <penulis></penulis>. Kelima, jumlah label metadata antara satu berkas teks dengan berkas teks lainnya tidak seragam. Ada berkas teks yang memuat enam label metadata, ada berkas teks yang memuat tiga label metadata, dan bahkan ada berkas teks yang tidak memuat label metadata sama sekali. Keenam, ada label metadata yang formatnya salah. Contoh format label metadata yang salah adalah ada label pembuka, tetapi tidak ada label penutup, misalnya di berkas teks tertulis <jenis>sastra, sedangkan seharusnya <jenis>sastra</jenis>. Contoh lain kesalahan format label metadata adalah kesalahan format *tag* penutup, misalnya di berkas teks tertulis <jenis>karya ilmiah<jenis>, sedangkan seharusnya <jenis>karya ilmiah</jenis>.



**Gambar 3**  
Perbandingan Metadata yang Ditampilkan pada Aplikasi Validator Berkas Korpus (Kiri) dan Metadata dalam Bentuk Berkas Asli (Kanan)



**Gambar 4**  
Daftar Frekuensi Kata yang dDitampilkan pada Aplikasi Validator Berkas Korpus (kiri) yang Semula Berasal dari Sebuah Berkas Unggahan (kanan)



### 3. Struktur Pangkalan Data

Entitas-entitas dalam pangkalan data aplikasi Korpus Universitas Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok entitas pengguna, yang berkaitan dengan pengguna, dan kelompok entitas korpus, yang berkaitan dengan korpus. Kelompok entitas pengguna meliputi peran (*role*), pengguna (*user*), kegiatan pengguna (*user\_activity*), dan peran pengguna (*user\_role*). Kelompok entitas korpus meliputi korpus, log korpus, dialek, variasi dialek (*dialect\_alias*), entri, entri\_metadata, entri\_teks, bahasa, variasi bahasa (*language\_alias*), *word*, *word\_count*, *subtype\_meta*, *type\_activity*, dan *type\_meta*. Untuk beberapa fitur tertentu, entitas dari kelompok entitas pengguna dapat mempunyai hubungan dengan entitas dari kelompok entitas korpus, misalnya entitas peran pengguna dengan entitas korpus untuk fitur penambahan anggota tim dan entitas pengguna dengan entitas log korpus untuk fitur pengiriman entri.

Pangkalan data dibangun menggunakan MySQL karena pengembangan aplikasi Korpus Universitas Indonesia berbasis jejaring dilakukan menggunakan XAMPP di komputer dan menggunakan panel kontrol penempatan jejaring (*web hosting control panel*) cPanel di *shared hosting*.

### 4. Desain Dan Arsitektur Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi Korpus Universitas Indonesia berbasis jejaring dirancang dengan pola arsitektur model-view-controller (MVC) dan dibuat menggunakan PHP. *Default language* yang digunakan dalam aplikasi *page interface* adalah bahasa Indonesia karena target pengunjung dan pengguna aplikasi adalah orang Indonesia dan orang yang berbahasa Indonesia. Meskipun demikian, pilihan untuk mengganti bahasa *page interface* menjadi bahasa Inggris juga disediakan untuk pengguna internasional.

Saat ini aplikasi Korpus Universitas Indonesia hanya terdiri atas satu korpus, yaitu korpus Jawa. Namun, aplikasi Korpus Universitas Indonesia yang dirancang terdiri atas beberapa korpus pada masa depan. Oleh karena itu, fitur utama yang ditampilkan di laman beranda aplikasi adalah fitur *select corpus* yang memungkinkan pengguna dapat memilih korpus yang ingin dilihat.



**Gambar 5**  
**Menu Pencarian dalam Laman Korpora Bahasa Jawa**



Pengguna aplikasi dibagi menjadi tujuh tipe, yaitu admin, editor kepala (*chief editor*), editor, kontributor data (*data contributor*), anggota tertunda (*pending member*), pengguna tertunda (*pending user*), dan takterkategori (*uncategorized*). Pengguna takterkategori (*uncategorized user*) adalah pengguna yang tidak melakukan *login* atau pengguna yang melakukan *login* dengan akun nonadmin atau akun yang tidak termasuk ke dalam anggota tim sebuah korpus. Pengguna tertunda (*pending user*) adalah pengguna yang sudah mendaftarkan akun baru, tetapi masih menunggu persetujuan admin. Anggota tertunda (*pending member*) adalah pengguna yang sudah mengirim permohonan berkontribusi ke sebuah proyek korpus, tetapi masih menunggu persetujuan editor kepala atau editor dari korpus tersebut. Editor kepala, editor, dan kontributor data adalah anggota tim sebuah korpus.

Ada dua modul utama aplikasi, yaitu modul pengguna dan modul korpus. Modul pengguna berisi fitur-fitur yang berkaitan dengan pengguna, misalnya pendaftaran (*sign up*), ganti kata pas (*reset password*), masuk (*login*), edit profil (*profile edit*), dan edit akun (*account edit*). Modul korpus berisi fitur-fitur yang berkaitan dengan korpus, misalnya fitur pemilihan korpus, pencarian daftar kata, dan penampilan hasil pencarian kata dari korpus dalam bentuk konkordansi. Fitur-fitur yang berkaitan dengan korpus ada yang dapat diakses oleh semua tipe pengguna, misalnya pencarian daftar kata, tetapi ada juga yang hanya dapat diakses oleh pengguna tipe tertentu, misalnya fitur tambah editor yang hanya dapat diakses oleh editor kepala.

## 5. Anotasi

Menurut Kübler dan Zinmeister (2015: 21), meskipun korpora merupakan peranti yang bermanfaat bagi penelitian kebahasaan, ada kasus-kasus yang membutuhkan lebih dari sekadar akses terhadap koleksi teks. Contohnya adalah kasus pencarian contoh-contoh pemakaian klausa relatif dengan *yang*, ada mempunyai induk dan ada yang tidak.

- (1) [Gadis]<sub>induk</sub> [yang mudah bosan]<sub>pewatas</sub> itu sudah berganti pacar lebih dari tiga kali dalam setahun ini.
- (2) [Yang bosan] di ruangan penumpang silakan mencari angin di geladak kapal agar dapat menemukan udara segar dan pemandangan laut yang indah.

Tentu saja menemukan konstruksi seperti ini sulitnya bukan main jika teks korpus yang kita miliki masih berupa teks mentah. Salah satu informasi yang bisa diakses secara otomatis antara lain adalah frekuensi kata. Jadi, idealnya memang ada informasi atau metadata yang kita sematkan pada teks mentah tersebut. Salah satu teknik yang lazim digunakan adalah pelabelan atau anotasi.

Menurut Kübler dan Zinmeister (2015: 45—156), ada cukup banyak teknik anotasi yang biasa diterapkan pada korpus, meliputi anotasi kata, anotasi sintaktis, anotasi semantis, dan anotasi wacana. Tentu saja pekerjaan anotasi cukup menantang dari segi kerumitan sistem serta biaya dan waktu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk tahap pertama, pada Korpus Universitas Indonesia diterapkan anotasi kata terlebih dahulu. Anotasi kata yang diterapkan adalah anotasi kelas kata (*part of speech tagging*). Set pelabelan yang digunakan adalah set label milik Indonesia Association for Computational Linguistics (INACL) yang dikembangkan oleh Totok Suhardijanto, Ayu Purwantiari, dan Gunarso untuk kebutuhan pengembangan sumber daya bahasa Indonesia. Dengan



demikian, set pelabelan inilah yang akan digunakan untuk menganotasi korpus teks bahasa Indonesia. Menurut Suhardijanto (2017), untuk memperoleh data teks berbahasa Jawa, dikembangkan lagi set label khusus berdasarkan set label INACL untuk anotasi kelas kata bahasa Jawa pada penelitian ini. Sistem pelabelan kelas kata bahasa Jawa ini memiliki 25 label seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. Sementara itu, set pelabelan kelas kata bahasa Sunda sedang dalam tahap perencanaan.

**Tabel 1**  
**Set Pelabelan Kelas Kata Bahasa Jawa**

No.	Simbol	Keterangan
1.	ADJ	Adjektiva
2.	ADK	Penanda Kala
3.	ADV	Adverbia
4.	ART	Artikula
5.	CCN	Konjungsi Koordinatif
6.	CSN	Konjungsi Subordinatif
7.	CUR	Penanda Mata Uang
8.	INT	Interjeksi
9.	NBR	Bilangan Angka (Numerik)
10.	NEG	Penafian
11.	NNO	Nomina Umum
12.	NNP	Nomina Nama Diri
13.	NUM	Numeralia
14.	PAR	Partikel
15.	PPO	Preposisi
16.	PRI	Pronomina Interogatif
17.	PRN	Pronomina
18.	PRR	Pronomina Relatif
19.	SYM	Tanda Baca
20.	UNS	Satuan Pengukuran
21.	VBI	Verba Intransitif
22.	VBK	Verba Keadaan ( <i>State Verbs</i> )
23.	VBP	Verba Penghubung ( <i>Linking Verbs</i> )
24.	VBT	Verba Transitif
25.	ZUK	Kata Tidak Dikenal

Pada bagian ini dilaporkan proses melabeli anotasi kelas kata bahasa Jawa karena pelabelan inilah yang telah dikerjakan ketika tulisan ini disusun. Pelabelan pertama kali dilakukan dengan melakukan anotasi manual terhadap set data yang akan menjadi set rujukan (*golden set*). Pelabelan manual dilakukan secara massal oleh 20 mahasiswa Program Studi Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Kemudian, set data diperiksa lagi secara otomatis, baik oleh ahli bahasa Jawa maupun oleh mesin. Data, seperti angka, lambang mata uang, satuan pengukuran, dan tanda baca, secara otomatis akan disemati label NBR, CUR, UNS, dan SYM secara berturut-turut. Pada bentuk turunan yang merupakan kombinasi dua kata, misalnya *epeking* dan *omahe*, dilakukan pemisahan secara



manual dan kemudian diberi label secara terpisah: *epek\_NNO ing\_PPO* dan *omah\_NNO e\_PRN*.

**Gambar 6**  
**Contoh Penerapan Pelabelan Manual (atas) yang Kemudian Dielaborasi Semiotomatis (bawah) pada Teks Bahasa Jawa**

96	Ananging,	CCN					
97	pangajap	NNO					
98	menika	PRN					
99	temtu	ADV					
100	kemawon	ADV					
101	mboten	NEG					
102	gampil	ADJ					
103	kados	PPO					
104	malik	VBT					
105	epek-epeking	NNO					
106	asta.	NNO					

Ananging\_CCN, \_SYM panajap\_NNO menika\_PRN temtu\_ADV  
kemawon\_ADV mboten\_NEG gampil\_ADJ kados\_PPO malik epek\_NNO -  
\_SYM epek\_NNO ing\_PPO asta\_NNO .\_SYMBOL

Set data acuan tersebut kemudian digunakan sebagai data pelatihan bagi sistem pembelajaran mesin (*machine learning*) untuk membangun, memvalidasi, dan meningkatkan kualitas sistem anotasi kelas kata bahasa Jawa.

## 6. Kondisi Termutakhir

Ketika naskah ini ditulis, beberapa perkembangan terjadi pada proyek Korpus Universitas Indonesia. Untuk konten korpus, selain korpus bahasa Jawa dan Indonesia, pada saat ini sedang dikembangkan pula korpus bahasa Sunda. Setelah teks Sunda didigitalisasi, dilakukan pembersihan terhadap teks untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak dibutuhkan dan memperbaiki masalah tipografi yang kadang-kadang salah. Beberapa naskah telah siap diunggah ke dalam pangkalan data korpus bahasa Sunda. Sementara itu, saat ini sedang disiapkan pula set label untuk bahasa Sunda berdasarkan set label INACL.

Korpus Jawa					
<a href="#">Info</a> <a href="#">Pencarian</a> <a href="#">Daftar Kata</a> <a href="#">Daftar Entri</a> <a href="#">Daftar Anggota</a> <a href="#">Kelola Korpus</a> <a href="#">Log</a>					
Kelola Korpus					
No.	Pengguna	Kiriman Entri dan Permintaan Kontribusi	Waktu	Tindakan	Pesan
1.	<a href="#">Eka Suci Setyaningrum</a>	Entri unggahan "MAKSIM KERJASAMA SAJRONE PAGELARAN WAYANG DHALANG KI KONDHO SRINAN JOYO ALIAS SUN GONDONG"	25 Des 2017, 22:24:15	<a href="#">LIHAT</a> <a href="#">EDIT</a> <a href="#">TERIMA</a> <a href="#">TOLAK</a>	-
2.	<a href="#">Eka Suci Setyaningrum</a>	Entri unggahan "MBARA SAJRONE CERBUNG MULIH NDESA ANGGITANE SURYADI WS(TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA)"	25 Des 2017, 22:24:16	<a href="#">LIHAT</a> <a href="#">EDIT</a> <a href="#">TERIMA</a> <a href="#">TOLAK</a>	-
3.	<a href="#">Eka Suci Setyaningrum</a>	Entri unggahan "NASIONALISME SAJRONE LAKON LUDRUK JAKA GALING PENDHEKAR GUNUNG PEGAT GRUP KARYA BUDAYA MOJOKERTO (TINTINGAN POSTKOLONIALISME)"	25 Des 2017, 22:24:16	<a href="#">LIHAT</a> <a href="#">EDIT</a> <a href="#">TERIMA</a> <a href="#">TOLAK</a>	-

**Gambar 6**

### Menu Kelola Korpus pada Laman Korpus Bahasa Jawa

Dalam aplikasi tersebut terdapat tambahan satu fitur, yaitu fitur edit entri. Fitur edit entri tersedia untuk (1) entri yang sudah disetujui dan dipublikasikan dan (2) entri kiriman dari kontributor yang masih harus ditinjau oleh editor. Fitur edit entri untuk entri yang sudah disetujui dan dipublikasikan tersedia di laman entri dan hanya dapat diakses oleh admin, kepala editor, dan editor. Fitur edit entri untuk entri kiriman dari kontributor tersedia di laman kelola korpus dan dapat diakses oleh (1) kontributor yang mengirim entri tersebut, (2) admin, (3) kepala editor, dan (4) editor. Jika kontributor pengirim entri mengedit entri yang dia kirim, status entri tersebut masih berupa entri kiriman dan harus ditinjau oleh editor. Jika kepala editor, editor, dan admin mengedit entri kiriman dari kontributor, setelah selesai diedit, entri tersebut akan berstatus disetujui dan dipublikasikan. Satu entri hanya dapat diedit oleh satu akun dalam satu waktu.

Korpus Jawa	
DHEIKSIS DUNUNG ING BASA JAWA	
<a href="#">&lt; Daftar Entri</a> <a href="#">Info</a> <a href="#">Pencarian</a> <a href="#">Daftar Kata</a> <a href="#">Log</a>	
Judul	DHEIKSIS DUNUNG ING BASA JAWA
Tahun	2017
Jenis	karya ilmiah
Subjenis	jurnal penelitian
Bahasa	Bahasa Jawa
Dialek	Jawa Tengah
Penulis	Aditya Rendra Pratama
Jumlah kata	7352
Status	Dipublikasikan dalam jaringan (online)
<a href="#">EDIT</a> <a href="#">HAPUS</a>	
<b>Teks</b>	
Abstrak	
<p>Dheiksis dunung ing basa Jawa sangerline panilitidurung ana kang niti nganti saiki, kahanan iki ndadekake paniliti sengkut anggota kepengin niti dheiksis dunung ing basa Jawa, sejatine wis ana kang ngrembug lan niti bab dheiksis, mung wae, dunung ana kang niti munjer ngenani dheiksis dunung. Mahasiswa UNESA miigine jurusan basa lan sastra Jawa uga durung ana kang niti dheiksis, apa maneh dheiksis dunung. Dheiksis dunung lumrah ditemokake ing basa Jawa kang digunakake manungsa kanggo ngaturake karep. Mula, paniliti ing paniliten iki njupuk dhata saka majalah Panjebur Semangat. Saka punjer kasebut, underane paniliten iki yaiku patang underan. (1) dheiksis dunung adhedhasar panandhes, (2) dheiksis dunung adhedhasar let, (3) dheiksis dunung adhedhasar pangener lan (4) dheiksis dunung adhedhasar obahe. Adhedhasar underan kasebut tujuwane paniliten ki yaiku (1) bisa njitrehake dheiksis dunung adhedhasar panandhes, (2) bisa njitrehake dheiksis dunung adhedhasar let, (3) bisa njitrehake dheiksis dunung</p>	

**Gambar 8**

### Tampilan Halaman untuk Pengeditan Naskah yang Telah Diunggah



## PENUTUP

Pada tahap ini sumber daya bahasa telah cukup berkembang meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Khusus korpus bahasa Jawa, telah dilakukan proses pelabelan kelas kata sebagai upaya meningkatkan akses terhadap informasi linguistik pada teks korpus. Titik perhatian pada tahap pertama ini adalah penentuan desain korpus dan pengembangan aplikasi korpus berbasis jaringan. Perihal desain korpus ditetapkan bahwa data korpus terdiri atas teks tulis dan teks lisan dengan porsi terbesar terletak pada teks tulis. Selanjutnya, aplikasi manajemen korpus berbasis jaringan dikembangkan dalam empat tahap, yakni pengumpulan kebutuhan (*requirement gathering*), analisis data awal, penyiapan struktur pangkalan data, serta perancangan desain dan arsitektur aplikasi berbasis jaringan.

Sumber daya bahasa Jawa masih terus dikembangkan untuk tahap-tahap berikutnya. Setelah pengumpulan data korpus dan pembangunan aplikasi manajemen korpus berbasis jaringan usai dan pelabelan kelas kata tuntas, tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah membangun sistem anotasi berikutnya yakni pengenalan nama dan entitas, pembedaan makna ambigu, serta pemilahan struktur kalimat yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan aplikasi manajemen korpus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S.T. (1984). "The Problem of Minority Languages in the Overall Linguistic Problems of our Time". In *Linguistic Minorities and Literacy: Language Policy Issues in Developing Countries*, ed. F. Coulmas. Berlin: Mouton.
- Alwi, H., and Sugono, D. (2000). "From National Language Politics to National Language Policy". Proceedings of the Seminar on Language Politics: Jakarta.
- Anthony, L. (2006). "Concordancing with AntConc: An Introduction to Tools and Techniques in Corpus Linguistics". Proceedings of the JACET 45th Annual Convention, pp. 218—219.
- Crystal, D. (2000). *Language Death*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), (2005). *Ethnologue: Languages of the World* (fifteenth edition). Dallas, Tex.: SIL Internasional.
- Kilgarriff, A., Baisa, V., Bušta, J., Jakubíček, M., Kovář, V., Michelfeit, J., Rychlý, P. and Suchomel, V. (2014). The Sketch Engine: ten years on. *Lexicography*, 1: 7—36.
- Kübler, S. dan & Zinmeister, H. (2015). *Corpus Linguistics and Linguistically Annotated Corpora*. London: Bloomsbury Academic.
- Lauder, Allan F. (2016). Language Policy and Planning: A Critical Review of Issues Relevant to the Mother Tongues]. Makalah dipresentasikan pada "Prevention Strategy for Indigenous Language Extinction", Denpasar, Bali. 26-27 February 2016.
- Lauder, M.R.M.T. (2005). Language Treasures in Indonesia. In *Words and Worlds: World Languages Review*, eds. Fèlix Martí, Paul Ortega, and Itziar Idiazabal et al., 95-97. Clevedon [England]; Buffalo [N.Y.]: Multilingual Matters.



- Lauder, M.R.M.T. 2016. Preventing the Extinction of the Regional Languages through Policy Formation. Makalah dipresentasikan pada The 9th National Seminar of Mother Tongue IX, "Prevention Strategy for Indigenous Language Extinction", Denpasar, Bali. 26-27 February 2016.
- Martí, F., Ortega, P., and Idiazabal, I. (eds.) (2005). *Words and Worlds: World Languages Review*. vol. 52. Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon [England]; Buffalo [N.Y.]: Multilingual Matters.
- Riza, H, Moejiono, and Mikami, Y. (2006). Indonesian Languages Diversity on the Internet, Internet Governance Forum (IGF), Athens.
- Riza, H. (2008). "Resources Report on Languages of Indonesia". The 6th Workshop on Asian Language Resources.
- Scott, M. (2016). *WordSmith Tools version 7*. Stroud: Lexical Analysis Software.
- Simons, G.F. and Fennig, C.D. (eds.). 2018. *Ethnologue: Languages of the World* (twenty-first edition). Dallas, Texas: SIL International. Online version: <http://www.ethnologue.com>.
- Suhardijanto, T. (2016). "Developing language resources for under-resourced languages in Indonesia". Makalah dipresentasikan pada International Conference on Knowledge Creation and Intelligence Computing 2016, State Polytechnics Institute of Manado, Manado, Indonesia, 15—17 November 2016.
- Suhardijanto, T. (2017). "Developing Rule-based POS Tagger for Javanese: The First Stage". Makalah dipresentasikan pada International Symposium on the Languages of Jawa (ISLOJ), Dian Nuswantoro University, Semarang, 18—19 Mei 2017.





**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Totok Suhardijanto & Arawinda Dinakaramani  
Judul : “Korpus Beranotasi: Ke Arah Pengembangan Korpus Bahasa-Bahasa di Indonesia”  
Hari, Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2018  
Pukul : 10.15—11.45  
Moderator : Dr. Ganjar Harimansyah  
Pencatat : 1. Miranti Sudarmaji  
2. Mukhamdanah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Sumber daya bahasa (SDB) adalah “set data dan deskripsi bahasa dalam bentuk yang terbaca oleh mesin. Data tersebut digunakan, secara khusus, untuk membangun, meningkatkan, atau mengevaluasi bahasa manusia, algoritme, atau sistem wicara, sedangkan serta secara umum, sebagai sumber daya utama bagi pelokalan peranti lunak dan industri pelayanan bahasa, pengkajian kebahasaan, transaksi internasional penerbitan elektronik, serta area spesialis subjek dan pengguna produk akhir” (European Language Resources Association). Yang termasuk ke dalam sumber daya bahasa adalah korpus tulis, korpus lisan, *treebank* (bank struktur), pangkalan data leksikal, kamus, dst.
2. Sumber daya bahasa, khususnya korpus, lebih banyak dibangun atas dasar inisiatif dari institusi asing, seperti Malay Concordance, Korpus Leipzig, Korpus Bahasa Indonesia SEALang, IndoWac, dan Malindo Conc. Namun, kini ada yang dibuat atas inisiatif Badan Bahasa yaitu KOIN (Korpus Indonesia). Korpus dalam bahasa daerah hanya tercatat satu yang disusun oleh US Department of Education, yaitu Korpus Bahasa Jawa SEALang.
3. Aplikasi korpus yang bernama Korpus Universitas Indonesia merupakan sistem manajemen korpus (*corpus management system*) yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola korpus serta melayani pencarian dan eksplorasi bentuk atau rangkaian kata dalam bentuk konkordansi, kolokasi, gabungan leksikal, dan frekuensi.
4. Saat ini aplikasi Korpus Universitas Indonesia terdiri atas tiga korpus, yaitu Korpus Jawa, Korpus Indonesia, dan Korpus Sunda.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Devina  
Instansi : IPB

**Pertanyaan:**

1. Ketika sebuah kata mempunyai banyak turunan, misalnya *duduk*, *menduduki*, *mendudukkan*, mahasiswa sering bertanya karena mengalami kesulitan memahaminya. Mengapa itu terjadi? Ada juga pertanyaan mengapa *me-*menjadi *di-*. Apa bedanya korpus UI dg KBBI V?



2. Dalam pengajaran sastra, sering muncul kesulitan dengan diksi-diksi sastra. Bagaimana hal itu dapat diakses agar dapat membantu mahasiswa memahami karya sastra?

**Jawaban:**

1. Contoh lain adalah penggunaan kata *memberdayakan* ketika digunakan oleh orang Indonesia. Hal itu dapat dilihat pula contoh-contoh penggunaannya. Saat ini lematisasi memang belum dilakukan. Korpusnya masih terbatas. Jadi, baru dapat ditampilkan *memberdayakan* saja, sedangkan turunannya belum ada, seperti *diberdayakan*, *pemberdayaan*, dan *diberdayakan*.
2. Korpus Universitas Indonesia sudah dapat digunakan, tetapi saat ini belum dapat diakses secara bebas.

**Penanya 2**

Nama : Mario

Instansi : FIB Universitas Indonesia

**Pertanyaan:**

Korpus yang baik diambil dalam rentang berapa tahun?

**Jawaban:**

Korpus yang baik dibuat dari bahan atau teks bergantung pada tujuannya, yaitu khusus, spesifik, sinkronis, atau diakronis. Korpus yang paling tua ialah korpus sinkronis pada tahun 2009. Namun, kita juga dapat memasukkan teks sebelum kemerdekaan sampai sekarang.

**Penanya 3**

Nama : Norma

Instansi : UI

**Pertanyaan:**

1. Apabila dalam pengumpulan data korpus teks terjadi salah ketik dalam hal validasinya, apakah harus diperbaiki atau apakah dimasukkan seperti apa adanya?
2. Untuk transkripsi, jika berupa data lisan banyak sekali terdapat interjeksi, apakah harus dimasukkan juga atau dihilangkan?

**Jawaban:**

1. Pengumpulan data korpus teks selama ini diambil dari laman sehingga tidak akan dilakukan perubahan terhadap teks yang diperoleh. Namun, ada kemungkinan dilakukan pembersihan, misalnya *m* terekam *n* itu harus diubah.
2. Dalam korpus lisan sering muncul kata-kata sebagai pengungkap perasaan, seperti interjeksi dan fatis. Jika interjeksi itu diulang lebih dari tiga, yang ditulis adalah yang tiga saja dan selebihnya diabaikan. Bentuk tegun dapat diabaikan, kecuali untuk tujuan penelitian tertentu. Namun, secara umum hal itu dapat diabaikan.

**Penanya 4**

Nama : Ahmad Muzaki

Instansi : UNJ

**Pertanyaan:**

Jika berbicara tentang data lisan, data harus ditranskripsikan. Apakah ada kemungkinan tidak ditranskripsikan secara manual, tetapi dijadikan sebagai pendeteksi suara?

**Jawaban:**

Transkripsi untuk korpus lisan memerlukan waktu yang cukup lama. Sampai saat ini hal itu masih perlu ditranskripsikan meskipun sebenarnya sudah ada alat yang dapat mentranskripsikannya. Namun, alat ini masih sangat mahal, yaitu yang versi *company*.

**Penanya 5**

Nama : David

Instansi : Universitas Indonesia

**Pertanyaan:**

1. Dari mana hak cipta, seperti novel, dapat diperoleh?
2. Mungkinkah digunakan anotasi selain dari BPPT?
3. Untuk *Treebank*, datanya diambil dari mana?

**Jawaban:**

1. Hak cipta diperoleh dengan bantuan kampus atau dengan mendatangi penerbit. Namun, tidak semua penerbit akan memberikan kemudahan. Untuk surat kabar, kita dapat mendatangi redaksinya.
2. *Treebank* yang digunakan ialah model konstituensi.



#### D. SUBTEMA 4: RAGAM BAHASA DAN SASTRA DALAM BERBAGAI RANAH KEHIDUPAN

##### 1. Ragam Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Ranah Kehidupan

Judul : Ragam Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Ranah Kehidupan  
Pembicara : Ahmad Tohari  
Jabatan : Sastrawan Indonesia  
Hari, Tanggal : Minggu, 28 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.30  
Moderator : Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Pak Dadang yang saya hormati, kepala Badan Bahasa, para pecinta bahasa Indonesia, para pejuang bahasa Indonesia, dan bapak wakil rakyat, serta peserta kongres yang berbahagia.

Pak Sutan sudah bicara panjang lebar tentang bahasa Indonesia. Jadi, saya akan berbicara mengenai bahasa dan sastra Indonesia. Ini ‘kan artinya kita berangkat dari latar bahwa bahasa Indonesia sekarang ini kurang berjaya. Ini agak terlalu pesimis ini, saya *nggak* suka pesimis. Mari kita mensyukuri karena bahasa Indonesia telah menolehkan dua visi yang luar biasa hebat, yaitu satu telah mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai-bagai suku. Itu fakta yang nyata dan suatu hal yang luar biasa. Yang kedua bahasa Indonesia telah mengakar dan sesuatu kebudayaan baru yang lebih mendukung demokrasi karena bahasa Indonesia tidak berjenjang. Fakta ini tidak terdapat sepertinya sampai hari ini sesuatu yang sangat penting sebab besar baik bahasa Indonesia terhadap bangsa. Lalu, yang kedua yang tadi disampaikan oleh pak Sutan, ‘kok bisa bangga menggunakan bahasa asing’, kalau saya bertanya mengapa, mengapa kita lebih suka mengucapkan *donasi* daripada *bantuan*, kita lebih suka menggunakan kata *konsisten* ketimbang *taat*. Kenapa? Dan apa dengan bangsa Indonesia *kok* lebih apa? Lebih suka yang asing jadi apa-apa yang dari luar dianggap lebih baik. Ini kondisi psikologi bagaimana bisa begitu. Tadi saya pakai kopiah, tetapi saya tidak pakai lagi. Harusnya saya pakai lagi. Begini menurut saya, pakai kopiah itu kita kurang bersih dijadikan oleh Allah sebagai bangsa Indonesia. Jadi, kita tidak bangga dengan keindonesiaan kita meskipun kita mensyukuri bahwa Tuhan menghadirkan kita sebagai bangsa Indonesia. Tandanya bersyukur adalah berhati-hati memelihara dan bangga dengan diri sendiri bukan bangga dengan orang lain. Milik kita lebih indah daripada bangsa lain. Kalau kita masih merendahkan bangsa sendiri, itu menghina takdir Tuhan. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dijadikan sebagai bangsa Indonesia dengan segala jati dirinya. Beberapa bulan yang lalu saya protes, kuping saya sakit mendengar frasa bahasa Inggris *full day school*. Ya ampun, ya ampun keluar dari konstruksi katanya. Saya tinggal di desa melihat dampak *full day school* itu, sekolah SD kami di gerbangnya tertulis *welcome*. Ya ampun. *Kok* jadi begini? Mana kebanggaan Indonesiamu? Mana syukurmu ditakdirkan menjadi orang Indonesia? Mana? Itu dari segi frasa, sistem. Sekarang dari segi psikologi, jangan-jangan orang-orang ahli psikologi hilang ketika mengatakan yang tidak menerima dirinya sendiri seketika jiwanya tidak tahan betul ada pendapat seperti itu. Kalau kita tidak mau menerima, kita menolak diri kita termasuk dalam hal kebahasaan. Mari kita sadar menjadi bangsa yang bersyukur dan menerima keindonesiaan kita secara tulus di dalam hal ini kebahasaan.



Lalu, yang kedua soal sastra. Tadi pak Sutan mengatakan bahwa kita ini dalam penelitian menempati tempat ke-60 dalam hal literasi dan yang ke-61 itu Boswana. Ada yang saya koreksi dari pidato pak Sutan bahwa Boswana itu Afrika, bukan Amerika Latin. Nah, bangsa yang besar ini ternyata tingkat literasinya menduduki posisi ke-60 dalam hal sastra, bahkan anak-anak SMA di Indonesia. Tak berhenti dulu di Malaysia 16, di Singapura 18, di Jepang 25, di Amerika Serikat 32, di Indonesia berapa? Kurang dari satu. Namun, dalam hal produksi hoaks paling hebat. Jadi, paling pintar *bikin* berita palsu. Mari kita hentikan *kayak* gini *kayak* gini. Lalu, mengapa orang nemu teks itu sebetulnya tidak datang begitu saja. Kalau kecil itu baru doyan teks, kalau di kepalanya sudah ada dalam khayalan. Kalau itu belum ada, teks akan tergantung dengan benda yang tidak bisa diterima. Ada imajinasi ini. Ibu-ibu ini sudah lupa yang namanya mendongeng ya, Bu? Ibu-ibu masih mendongeng untuk anak? Kalau di kepala anak-anak tidak ada ruang majinasi, itu tidak akan ada kecintaan terhadap cerita, tetapi tiba-tiba jadi teks cerita. Ini yang harus disadari dari dunia pendidikan kita. Bercerita atau mendongeng adalah langkah pertama dalam literasi. Saya sering bertanya kepada teman-teman sesama pengarang. Kamu waktu kecil didongengi? Iya. Di musala didongengi, di rumah didongengi, di ladang didongengi. Jadi, sebelum mengenal teks sebelum mengenal huruf, di kepala sudah timbul ruang imajinasi. Jadi, saat ada teks mengenai cerita, langsung dilahap langsung dilahap. Dan kalau sudah ketagihan, anak akan lebih menuntut buku daripada jajanan. Nah, kesalahan kita adalah meninggalkan tradisi dongeng. Padahal dongeng itu tidak harus yang kuno. Dongeng bisa sesuatu yang modern, bisa saja mengenai pesawat terbang, mesin bisa diciptakan, bagaimana keadaannya itu 'kan dongeng. Kita hanya melakukan itu semua tidak menuntut anak suka membaca itu tidak bisa. Itu teks bila datang ke anak yang tidak memiliki ruang imajinasi sesuatu yang dalam. Bagaimana, Bu? Nanti pulang terus dongeng ya, Bu. Begini, Pak, termasuk saya itu pak Sutan sangat suka mendengar dongeng dan salah satu dongeng yang saya ingat selalu itu diceritakan oleh kakek. Kakek itu petani, buta huruf, tetapi suka nonton wayang, lalu cerita wayangnya didongengin ke saya. Ini pasti di sini *nggak ngerti* Arjuna dan istrinya Subadra. Arjuna masih remaja, tetapi sudah mata keranjang, kata kakek saya. Subadra itu masih bimbang. Arjuna itu mata keranjang. Seseorang yang mata keranjang dan gombalin Larasati, lalu diculik dibawa ke kebun disuruh makan sirih dan mereka bercerita dalam pertemuan itu. Ini cerita kakek saya *loh*. Itu masuk ke jiwa saya sampai saya menjadi suka bercerita, menjadi suka berkhayal, menjadi suka berimajinasi, dan lama-lama saya jadi pengarang. Ini untuk memberi ilustrasi bahwa dongeng itu penting. Tidak usah dongeng yang lama-lama, bisa cerita dari kota mana ke kota mana ceritakan itu ke anak. Saya menjamin cerita itu ke anak, dia akan dengan senang hati mendengarkan cerita itu karena dia ingin tahu. Masa-masa ingin tahu ya segitu. Nah kalau itu sudah lewat, tiba-tiba disuruh membaca naskah sastra *nggak* doyan. Apalagi sekarang mendapat saingan hp.

Bapak ibu sekalian, kemudian apa *sih* pentingnya sastra? Sastra itu sangat penting. Apakah ada Bapak Ibu yang sastrawan?

Orang menjadi kehilangan kepercayaan terhadap sastra karena tidak bisa untuk cari makan. Itu yang repot. Majalah Kartini pernah mengadakan angket. Saya saat itu salah satu redaktornya. Pekerjaan yang paling terkenal di era 10 dokter, perwira, pengusaha, pejabat tinggi terakhir itu wartawan dan pengarang. Itu yang terakhir. Jadi, tidak ada ibu yang kepengen menantu pengarang. Sekarang juga masih



terbukti. Kelas-kelas SMA perbandingannya tidak tidak seimbang. IPA saya di sekolah itu IPA 9, IPS 2, kelas Bahasa 1. Itu *aja* baru dua tahun terbentuk. Masyarakat sendiri tidak doyan sastra. Pak Dadang kenapa masyarakat tidak suka baca? *Ngapunten* karena rasa ingin tahu kita itu tidak seperti bangsa-bangsa lain yang rasa ingin tahunya tinggi. Kita rendah. Hal ini yang perlu kita perbaiki. Yang namanya kegiatan baca tulis, literasi gampangnya itu sarana untuk pengembangan diri. Anak-anak muda, kalian-kalian yang muda-muda itu kalau tingkat literasinya rendah dan kemudian perkembangannya tidak optimal sudah jelas di depan kamu itu lapangan-lapangan kerja yang tidak bermutu tidak seperti pak Sutan itu DPR gajinya gede tunjangan gede. Nah, jadi artinya apa? Ayo kita berliterasi di dalam kesempatan yang ini saya ingin mengajak yang muda-muda ini ayolah jadi pembaca yang kuat yang banyak. Kemudian, lanjutkan menjadi penulis dan kalian bisa. Tolong camkan aku bisa menjadi pembaca yang kemudian menjadi penulis. Itu tidak sulit. Kalau Anda membaca, kemudian mulai menuliskan terus berproses nanti dua tahun sudah menjadi pengarang. Setidaknya pengetahuan Anda menjadi banyak dan itu artinya apa daya saing Anda menjadi kuat seperti itu. Kemudian, ini ketua Komisi X, 16 Agustus 2016 saya dan beberapa teman diundang pak Jokowi. Hebat 'kan? Pengarang diundang pak Jokowi. Nah ada 25 orang, tetapi yang diajak bicara hanya 5 orang, saya termasuk. Karena hanya diberi kesempatan dua menit saya *bilang* ke pak Jokowi kalau kita berada di krisis kesusastaan. Orang-orang tidak suka baca. Anak-anak kurang membaca buku, padahal setiap anak harus tumbuh seimbang antara intelektualitas dan sensitivitas, namun kadang tidak seperti itu, tetapi kalau orang pintar tidak punya perasaan malah berbahaya 'kan? Lebih baik orang bodoh. Orang pintar tidak sensitif itu seperti anak kecil mainan silet. Jadi, waktu itu pak Jokowi mendengar dan suruh bapak yang di sini tadi pak pejabat itu. Jadi, untuk pak Sutan tolong kalau eksekutif menyodorkan anggaran pengadaan buku sastra atau mengangkat diri sastra tolong disetujui karena pak Jokowi juga sastra. Kalau *ngomongin* ini untuk rakyat, kemajuan untuk pemuda didukung, tetapi kalau rakyatnya tidak bagus, ya, tidak mendukung sastra kita untuk memperbaiki sesuatu literasi. Bapak bilang sendiri tadi tingkat literasi kita hanya satu tingkat di atas Boswana jangan terus semuanya buta huruf. Memalukan sekali. Melalui KBI ini mari kita sadar literasi dan anak-anak terutama. Mari kita mulai membaca dan menulis. Dan tolong juga soal bahasa Indonesia di media saya juga ingin mengkritik teman-teman wartawan yang suka memberi judul dalam bahasa Inggris. Ada satu koran daerah membuat judul begini jalan eksusi menuju jembatan akan ditutup. Aneh *nggak* membacanya, itu di koran. Maksudnya 'kan jalan yang sudah mau ditelusuri adalah jalan yang sudah ada, jalan lama. Jalan lama menuju jembatan akan ditutup selesai 'kan. Jalan ekskusi, *preet*, memang yang dicari kerennya. Bodoh *gapapa* yang penting keren. *Mbok*, jangan menerbitkan novel berjudul bahasa Inggris, tetapi isinya bahasa Indonesia. Atau kalau menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sempurnakan dengan judulnya ikut diterjemahkan. Gramedia Anda itu lembaga besar, lembaga berwibawa, dan diakui oleh banyak orang. Kompas juga bahasanya bercampur, mengutamakan menurut *zaman now*. Itu apa *sih* motivasinya? Kira-kira ada yang bisa menjawab satu saja? Keren, ya? Biar keren gitu, ya? Suruh-menyuruh, nah melalui KBI ini kita rayakan bahasa Indonesia dan saya menurut perasaan saya sendiri sedang melakukan itu. Mencintai bahasa Indonesia telah menulis sekian puluh teks panjang-panjang dengan rasa cinta yang besar terhadap bangsa Indonesia dan penuh tanggung jawab



yang besar terhadap bahasa Indonesia. Jadi, siapa yang pernah membaca teks saya pasti mendengarkan kata ini. Saya menulis teks dalam bahasa Indonesia itu dengan penuh kecintaan dengan pengabdian dan dengan penuh tanggung jawab memartabatkan bahasa Indonesia ini. Kalau saya bisa, semua yang ada di sini bisa. Dan mari kita bersama-sama menjayakan bahasa Indonesia. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Ahmad Tohari  
Hari, Tanggal : Minggu, 28 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.30  
Pencatat : 1. Azhari Dasman Darnis  
2. Kunkun Purwati  
3. Nadia Almira Sagitta

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Tema KBI XI—Menjayakan Bahasa dan Sastra—berangkat dari rasa kurang optimis. Padahal, bahasa Indonesia sudah mempersatukan ratusan suku. Bahasa Indonesia mengajarkan kebudayaan baru yang sangat demokratis.
2. Berkenaan dengan xenofilia, masyarakat semestinya lebih bersyukur dilahirkan menjadi orang Indonesia. Tanda bersyukur adalah berhati-hati memelihara dan bangga dengan diri sendiri. Kalau kita masih menganggap diri kita rendah dari bangsa lain, itu tandanya kita menghina Tuhan. Padahal, siapa yang tidak menerima dirinya sendiri seutuhnya jiwanya tidak sehat.
3. Tamatan anak SMA rata-rata telah membaca: di Malaysia 16 buku, Singapura 18 buku, Jepang 25 buku, Amerika 32 buku, sedangkan Indonesia kurang dari 1 buku.
4. Anak kecil baru doyan teks kalau di kepala anak sudah ada ruang imajinasi. Jika belum ada ruang imajinasi, teks akan menjadi benda yang tidak bisa diterima. Kesukaan terhadap teks berkaitan dengan ruang imajinasi di kepala dan ruang imajinasi tersebut ditumbuhkan dengan bercerita atau mendongeng.
5. Bercerita atau mendongeng adalah langkah pertama membuka pintu literasi.
6. Kesalahan kita adalah menyingkirkan tradisi dongeng. Padahal, dongeng tidak harus dengan sesuatu yang kuno. Kita bisa menceritakan bagaimana Wright bersaudara menemukan pesawat; bagaimana mesin diesel diciptakan.
7. Orang kehilangan kepercayaan terhadap sastra karena tidak bisa untuk cari makan. Masyarakat kita tidak doyan sastra karena rasa ingin tahu tidak seperti bangsa lain yang rasa keingintahuannya tinggi. Hal ini perlu kita perbaiki karena literasi adalah sarana utama pengembangan diri. Mari menjadi pembaca kuat, lalu lanjutkan jadi penulis!
8. Dengan banyak membaca, tabungan pengetahuan Anda menjadi banyak dan daya saing Anda menjadi kuat.
9. 16 Agustus 2012, saya diundang Pak Jokowi. Pak Ahmad Tohari menyarankan harus seimbang antara intelektualitas dan sensitivitas. Orang pintar yang tidak punya perasaan malah berbahaya.
10. Catatan untuk penerbit buku: jangan terbitkan novel dengan judul bahasa Inggris apabila isinya bahasa Indonesia. Apabila novel terjemahan, sertakan judul bahasa Indonesianya. Penerbit atau surat kabar jangan menerbitkan buku atau tulisan yang berbahasa asing hanya agar terlihat “keren”.





## **Tanya Jawab**

### **Penanya 1**

Nama : Munira Hasjim

Instansi : Unhas Makassar

### **Pertanyaan:**

Dongeng bisa menguatkan karakter anak dan membentuk pribadi anak, tetapi hal ini tergeser dengan adanya telepon genggam. Bagaimana strategi yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan nilai-nilai sastra kepada masyarakat? Ketika kami membuat proposal penelitian bidang sastra, kami dituntut *output* yang nyata berbentuk produk. Padahal, *output* kita berbeda dengan bidang ilmu sains. Bagaimana memberikan alasan yang kuat agar sastra tidak menjadi hal yang disepelekan?

### **Jawaban:**

Untuk membatasi ketergantungan anak dengan gawai dapat juga diatasi dengan kegiatan mendongeng dan bercerita. Kemarin di Balai Bahasa Jateng terdapat anak usia 9 tahun bisa menulis puisi yang sangat baik dan anak 13 tahun bisa menulis 600 halaman. Ternyata kemampuan ini terbentuk dari kebiasaan didongengi orang tua sejak kecil. Semoga anak-anak kita bisa berpisah dari gawai meskipun tidak total.

### **Isu-Isu Penting:**

Melestarikan budaya bercerita dan mendongeng sangat penting untuk menumbuhkan ruang imajinasi pada anak-anak dan meningkatkan kemampuan literasi.



## 2. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Bahasa dan Sastra

Judul	: Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Bahasa dan Sastra
Pembicara	: Amich Alhumami
Jabatan	: Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan Nasional
Hari, Tanggal	: Selasa, 30 Oktober 2018
Pukul	: 08.00—10.00
Moderator	: Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S.

Salah satu kerisauan kita adalah tentang perkembangan bahasa kita yang saat ini mengalami pertarungan serius. Satu sisi kita harus berusaha untuk menjaga keberlangsungan eksistensi keberadaan bahasa Indonesia, tetapi kita juga berada dalam kepingan bahasa-bahasa asing. Di sisi lain, kita juga harus menjaga bahasa daerah.

Kecenderungan mutakhir yang terlihat adalah bagaimana penggunaan istilah yang karena ketidapahaman pengguna menjadi tidak tepat konteks dan keliru pemaknaannya sehingga yang tampil malah terbaca secara lucu. Hal itu tidak mencerminkan bahwa kita memiliki kosakata bahasa Indonesia sendiri yang sebenarnya sangat kaya. Kita mencoba untuk mengambil alih atau mengadopsi dan menggunakan bahasa asing secara tidak tepat. Misalnya, antara kata *mail* dan *gmail* saja kita sering keliru memaknainya. Kita seperti tidak memiliki kebanggaan terhadap penggunaan bahasa nasional kita sendiri.

Hal-hal yang lucu, misalnya, mengalihbahasakan Indonesia ke dalam bahasa Inggris, tetapi dengan struktur yang salah. Ungkapan *Tiada hari tanpa belajar*, misalnya, dialihbahasakan menjadi *no learning no day*. Betapa kelucuan seperti ini mencerminkan bahwa masih terdapat masalah dalam hal identitas kebangsaan dan tentang identitas kebudayaan. Kita mengadopsi budaya asing, tetapi menegaskan bahwa kita mengalami sindrom inferioritas. Betapa kacaunya jalan pikiran kita. Padahal, bahasa dan penguasaan bahasa itu juga mencerminkan tingkat kecerdasan dan menggambarkan kemampuan kita dalam mengolah logika dan rasionalitas. Akan tetapi, ketika kita tidak menempatkannya secara benar, memahaminya dengan baik, dan menggunakannya dengan tepat, yang muncul adalah kekacauan berpikir.

Tugas dan tanggung jawab kita semua Kemendikbud, secara khusus Badan Bahasa dalam menunaikan tugas-tugas untuk mengembangkan, melestarikan, menjaga, dan merawat keberadaan bahasa Indonesia. Uraian teknisnya dalam butir-butir undang-undang sudah dipahami.

Kita seolah-olah bergerak mundur dari yang dahulu sudah pernah kita capai dengan baik dan cemerlang. Dahulu telah lahir tokoh-tokoh dan ahli bahasa yang kemampuan dan kemahiran teknikalistiknya dalam bidang bahasa sangat luar biasa, seperti Anton Muliono, Jus Badudu, Harimurti Kridalaksana, dan Amran Halim. Mereka mengisi ruang publik. Mereka mahaguru bahasa Indonesia. Kita mendapat pelajaran yang luar biasa dari mereka. Betapa mereka dapat menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia dengan sangat mengena dan dapat dicerna dengan baik. Kita mendapat kosakata baru, menyusun kalimat, belajar memilih kata, diksi, dan menggunakannya dalam susunan kalimat yang teratur dan rapi. Akan tetapi,



reputasi tokoh dahulu sedemikian cemerlang sehingga yang lahir saat ini belum dapat menutup kecemerlangan yang sudah dicapai oleh tokoh-tokoh tersebut. Impresi yang didapatkan dari pelajaran bahasa dari tokoh-tokoh dahulu dan buku-buku mereka sangat luar biasa. Dari mereka kita belajar bagaimana menggunakan bahasa untuk bertutur dan menulis dengan baik dan benar.

Betapa indah dan memikatnya bahasa Indonesia justru diminati oleh orang asing, seperti Muller yang menulis disertasi tentang Ramadan di Jawa. Keahliannya memang di bidang kebudayaan Islam Jawa, tetapi peminatannya terhadap bahasa Indonesia sungguh luar biasa. Kerja kesarjanaan beliau yang dituliskan dalam bentuk kamus Indonesia-Swedia sangat membantu kita. Kalau orang asing saja peminatannya luar biasa, mestinya kita harus tertantang untuk melakukan hal yang sama. Pengembangan bahasa Indonesia justru dilakukan oleh orang asing. Kita berterima kasih karena mereka telah memperkaya kebudayaan dan bahasa Indonesia dalam konteks domestik saja, tetapi juga telah mengantarkan bahasa Indonesia ke publik internasional melalui buku dan kamus.

Tantangan kita adalah bagaimana pengembangan bahasa di setiap institusi pendidikan, baik di pendidikan dasar maupun di pendidikan tinggi. Terdapat keluhan dari mereka tentang hal ini, tidak hanya karena mereka merasa kurang berminat, tetapi juga mereka mengatakan bahwa sulit untuk mempelajari bahasa Indonesia. Ketika hal itu dialami, ternyata para pengarang buku sekolah tidak mencoba untuk menuliskannya menurut kemampuan bahasa sesuai dengan jenjang anak di sekolah. Saya mendapati bahwa banyak yang tulisannya memiliki tingkat abstraksi yang sangat tinggi, misalnya, muncul kata *konektivitas*. Kata itu tidak saja merupakan serapan, tetapi juga butuh penjelasan untuk memahaminya. Istilah itu terdapat dalam buku jenjang sekolah yang sebenarnya masih belum tepat untuk memahami itu.

Sebagian perguruan tinggi telah menghapus pelajaran bahasa Indonesia. Mohon saya dikoreksi jika hal itu keliru. Ada yang menggantinya dengan *academic writing*. Bagaimana mahasiswa dapat menyusun skripsi, karya tulis, dan *paper* dengan baik? Hal itu merupakan salah satu kelemahan kita. Kita dapati karya dan skripsi mereka tidak mencerminkan seorang sarjana yang memiliki kemahiran dalam berbahasa Indonesia.

Hal yang perlu kita cermati adalah terdapatnya kesadaran untuk melestarikan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Hal ini sangat menggembirakan. Betapa kebanggaan dalam penggunaan bahasa Indonesia harus dicontohkan oleh pejabat-pejabat tinggi kita. Para pemimpin asing ketika berbicara di PBB menggunakan bahasa nasional mereka. Mereka sangat mahir dalam berbahasa Inggris. Akan tetapi, mereka menggunakan bahasanya karena lebih memiliki kebanggaan sekaligus menegaskan identitas nasional mereka.

Pemangku kepentingan yang paling pokok dalam pengembangan bahasa adalah Kemendikbud. Setelah itu, kita harus memanfaatkan komunitas di masyarakat seperti pegiat literasi. Penghargaan terhadap tokoh yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik perlu dicontoh.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Judul : Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Bahasa dan Sastra  
Pembicara : Amich Alhumami, M.A., M.Ed., Ph.D.  
Jabatan : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan Nasional  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 08.00—10.00  
Moderator : Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S.  
Pencatat : Anita Ningrum dan Nadia Almira Sagitta

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Bahasa Indonesia dalam kepingan bahasa-bahasa asing dan dihadapkan pula dalam upaya melestarikan bahasa daerah.
2. Kita seolah tidak punya kebanggaan atas bahasa nasional kita.
3. Kelucuan dalam pengalihan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris di ruang publik ini mencerminkan identitas kebangsaan dan kebudayaan.
4. Penguasaan bahasa mencerminkan tingkat kecerdasan. *Jika kita tidak memahami dan menggunakan bahasa secara tepat muncul kekacauan berpikir.*
5. Kita seolah bergerak mundur dari lahirnya tokoh-tokoh dan ahli bahasa yang kemahiran teknikalitinya sangat baik, seperti Amran Halim, Harimurti Kridalaksana, Jus Badudu, Lukman Ali, dan Anton Moeliono. Mereka mengisi ruang-ruang publik, seperti radio, televisi, dan forum-forum. Ketika mereka menyajikan pembelajaran sangat mengena dan mudah dicerna. Ahli bahasa saat ini belum sekuat tokoh-tokoh ini.
6. Jika orang asing menaruh peminatan yang luar biasa terhadap bahasa Indonesia, mestinya kita juga tertantang untuk melakukan hal yang sama. *Pengembangan bahasa Indonesia justru dilakukan oleh orang asing.*
7. Ini menunjukkan bahwa mereka berkontribusi dan kita terbantu terhadap pengembangan bahasa Indonesia.
8. Pelajar mengatakan sulit untuk mempelajari bahasa Indonesia.
9. Ada sebagian perguruan tinggi yang menghapuskan pelajaran bahasa Indonesia.
10. Kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia harus dicontohkan oleh elit-elit kita. Keterlibatan seluruh pemangku penting untuk mengembangkan bahasa Indonesia dan daerah.
11. Tiga frasa kemampuan berkomunikasi, keterampilan menulis, pembaruan model pembelajaran pada seluruh tingkat pendidikan.



### 3. Meneliti Bahasa Isyarat dalam Perspektif Variasi Bahasa

#### MENELITI BAHASA ISYARAT DALAM PERSPEKTIF VARIASI BAHASA Silva Tenrisara Isma

##### Abstrak

Bahasa isyarat Indonesia atau biasa disingkat Bisindo merupakan bahasa isyarat yang digunakan oleh orang-orang tuli di Indonesia untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa isyarat juga merupakan penanda identitas bagi penggunanya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang bahasa isyarat sebagai kajian penelitian linguistik dengan penekanan pada kajian variasi bahasa isyarat. Salah satu hal yang dapat kita ketahui bahwa Indonesia tidak hanya memiliki keberagaman bahasa secara lisan, tetapi juga keberagaman bahasa isyarat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pengkajian variasi bahasa isyarat menjadi penting untuk pendokumentasian bahasa isyarat dan selanjutnya dapat bermanfaat untuk pengembangan kegiatan praktik bahasa isyarat, seperti penjurubahasaan dan pengajaran. Sebagai bahasa kaum minoritas, penelitian bahasa isyarat tentunya memiliki teknik, pendekatan, dan konsekuensi tertentu. Pada makalah ini juga dibahas tentang teknik penelitian bahasa isyarat yang melibatkan peneliti, baik tuli maupun dengar berdasarkan pengalaman penelitian bahasa isyarat.

**Kata-kata kunci:** bahasa isyarat, Bisindo, variasi, tuli

##### Abstract

*Indonesian sign language or is known as Bisindo is a language that is used for communication by deaf people in Indonesia. In addition, sign language is a tool to indicate a certain identity as language users. The purpose of this paper is to discuss deeply about sign language through researching sign language. One thing that we know that Indonesian not only have its language diversity in verbal language, but it also has its language diversity in sign language. Thus, the study of sign language variation plays an important role in sign language documentation, which further benefit to the practice of the language, such as interpreting and language teaching. As a language of minority group, sign language research certainly calls for distinct techniques, approach, and consequence. This paper also discusses sign language research techniques, which involve deaf and hearing researchers.*

**Keywords:** sign language, Bisindo, variation, deaf

##### Pendahuluan

Bahasa isyarat merupakan bahasa yang digunakan oleh komunitas tuli atau tunarungu<sup>1</sup> untuk berkomunikasi. Tidak hanya itu, bahasa isyarat juga merupakan alat bagi penggunanya untuk mengidentifikasi diri dan memperoleh informasi. Perbedaan mendasar antara bahasa isyarat dan bahasa lisan terletak pada modalitas atau sarana produksi dan persepsinya. Bahasa lisan diproduksi melalui alat ucap

---

<sup>1</sup> Pada artikel ini akan digunakan istilah *tuli*. Istilah ini dipilih karena merupakan preferensi sebagian besar anggota komunitas tuli yang menggunakan bahasa isyarat.



(oral) dan dipersepsi melalui alat pendengaran (auditoris), sedangkan bahasa isyarat diproduksi melalui gerakan tangan (gestur) dan dipersepsi melalui alat penglihatan (visual). Dengan demikian, bahasa lisan bahasa yang bersifat oral-auditoris, sedangkan bahasa isyarat bersifat visual-gestural.

Secara linguistik, bahasa isyarat terdiri atas satuan terkecil hingga terbesar seperti bahasa lisan. Bahasa isyarat juga memiliki fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik tersendiri yang tidak sama dengan sistem bunyi, tata kata, tata kalimat, dan pemaknaan yang sama dengan bahasa lisan. Dengan kata lain, bahasa isyarat merupakan sistem linguistik yang tidak didasarkan pada sistem bahasa lisan. Hal itu disebabkan oleh perbedaan modalitas yang mendasar antara bahasa lisan dan bahasa isyarat.

Pengkajian bahasa isyarat sebagai sebuah kajian linguistik tentunya sangat menarik untuk dilakukan mengingat masih sangat sedikitnya penelitian bahasa isyarat, khususnya di Indonesia. Di antara penelitian bahasa isyarat di Indonesia adalah Palfreyman (2014), Isma (2012), Suwiryo (2013), dan Soejanto (2012). Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa bahasa isyarat di Indonesia terdiri atas berbagai variasi bahasa, bahkan bahasa yang berbeda (lihat Isma 2012 dan Suwiryo 2013), di antaranya adalah bahasa isyarat di Jakarta, Yogyakarta, Solo, Makassar, dan Bali. Dengan demikian, penelitian terhadap bahasa isyarat di Indonesia masih sangat terbuka secara cakupan wilayah dan cakupan penelitiannya.

Seperti penelitian linguistik dan ilmu-ilmu lainnya, penelitian bahasa isyarat juga mengikuti berbagai pendekatan dan metode penelitian yang umum digunakan. Telah dilakukan berbagai penelitian dialektologi terhadap banyak bahasa isyarat di dunia (di antaranya Woodward, 1976; McKee et al., 2000; Johnston, 2003) dan penelitian sosiolinguistik (McKee et al., 2006) dengan berbagai pendekatan dan bidang kajian linguistik lainnya. Walaupun demikian, tentu terdapat perbedaan dalam proses meneliti dengan proses meneliti bahasa lisan karena terdapat faktor nonlinguistik yang melingkupi sebuah penelitian bahasa isyarat. Faktor tersebut berkaitan dengan situasi kebahasaan bahasa isyarat, kedudukan bahasa isyarat di dalam komunitasnya sendiri, dan komunitas tuli itu sendiri. Sehubungan dengan itu, artikel ini akan difokuskan pada proses meneliti bahasa isyarat yang mencakup informasi tentang perkembangan studi bahasa isyarat, situasi kebahasaan dan komunitas pengguna bahasa isyarat, tantangan penelitian, dan teknik penelitian bahasa isyarat.

### **Perkembangan Studi tentang Bahasa Isyarat**

Perhatian akan penggunaan bahasa isyarat dapat ditelusuri sejak Plato (360 SM) dalam karyanya *Cratylus* yang menyatakan bahwa jika seseorang tidak mempunyai suara atau lidah seperti orang-orang tuli, buatlah isyarat dengan menggunakan tangan, kepala, dan tubuh (dalam Johnston dan Schembri 2007: 21). Keyakinan terhadap bahasa isyarat sebagai bahasa manusia yang alami pun dinyatakan oleh René Descartes pada abad ke-18 (Johnston dan Schembri 2007: 21).

Studi linguistik bahasa isyarat dapat dikatakan lebih muda jika dibandingkan dengan perkembangan studi bahasa lisan di dunia. Kajian linguistik bahasa isyarat modern dianggap diteroka oleh William Stokoe pada tahun 1960 melalui publikasi buku *Sign Language Structure* tentang struktur bahasa isyarat Amerika (ASL) (Johnston dan Schembri 2007: 21). Buku tersebut merupakan hasil penelitiannya



yang menyatakan bahwa studi linguistik terhadap ASL membuktikan bahwa ASL merupakan bahasa tersendiri yang tidak didasarkan pada struktur bahasa dan kosakata bahasa Inggris. Penelitian linguistik bahasa isyarat terus berkembang hingga saat ini dan mulai dilakukan di kawasan Asia pada tahun 1990-an. Di Indonesia penelitian linguistik bahasa isyarat baru dimulai pada tahun 2000-an, seperti yang dilakukan oleh para peneliti yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan.

Penelitian terhadap bahasa isyarat telah membawa dampak signifikan terhadap kedudukan bahasa isyarat, baik di dalam maupun di luar komunitas tuli. Penelitian linguistik bahasa isyarat menunjukkan bahwa bahasa isyarat merupakan bahasa alami yang memiliki properti yang sama dengan bahasa lisan. Bahasa isyarat merupakan sebuah sistem linguistik yang kompleks, unik sekaligus universal, produktif, dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu (lihat Johnston dan Schembri 2007: 26). Bukti-bukti linguistik dari penelitian bahasa isyarat menguatkan bahasa tersebut sebagai sebuah bahasa alami yang dapat digunakan dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan sebagainya. Pengakuan terhadap bahasa isyarat sebagai bahasa yang setara dengan bahasa lisan akan membuka akses penggunaannya terhadap segala kesempatan dalam kehidupan. Untuk itulah, penelitian terhadap bahasa isyarat serta pengumpulan bukti-bukti linguistik bahasa isyarat perlu terus dikembangkan dan dilakukan.

### **Komunitas Tuli dan Variasi Bahasa Isyarat di Indonesia**

Di Indonesia terdapat sekitar 10 juta orang tuli, mulai dari yang mengalami ketulian dari lahir sampai yang mengalami ketulian pada usia dewasa. Akan tetapi, kepastian angka tentang anak yang terlahir tuli belum dapat diketahui. Selain itu, jumlah anak-anak tuli yang memiliki orang tua tuli (*deaf family*) tidak dapat diketahui dengan jelas. Hal ini sangat penting untuk keberlangsungan penelitian terkait proses perkembangan bahasa yang diterima anak-anak tuli secara langsung dari orang tua tuli melalui Bahasa isyarat.

Situasi komunitas tuli sangat variatif walaupun berjumlah lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah orang dengar. Hal itu disebabkan oleh perbedaan latar belakang tiap individu, seperti keluarga, sekolah, dan tempat tinggal. Ketiga faktor tersebut dapat memengaruhi kemampuan berbahasa isyarat dan variasi bahasa isyarat yang digunakan. Seorang tuli yang berorang tua dengar, misalnya, biasanya baru mendapatkan kesempatan mengenal bahasa isyarat di atas umur 6 tahun, yaitu ketika ia mulai bersekolah di sebuah sekolah luar biasa. Sebaliknya, anak tuli yang berasal dari orang tua tuli biasanya memperoleh bahasa isyarat sejak dini. Dengan demikian, kemampuan berbahasa isyarat yang dimiliki orang tuli tidak sama.

Sekolah dan tempat tinggal juga memengaruhi penggunaan bahasa isyarat. Seperti bahasa lisan, bahasa isyarat juga memiliki variasi regional, bahkan memiliki bahasa isyarat yang berbeda di dalam sebuah wilayah (lihat Isma 2012, Suwiryo 2013). Selain itu, latar pendidikan, khususnya sekolah tempat seorang tuli belajar, juga merupakan faktor penting dalam variasi bahasa isyarat yang digunakan (Padden 2011). Hal ini disebabkan oleh sekolah luar biasa merupakan tempat anak-anak tuli bertemu dan berinteraksi sehingga bahasa isyarat banyak tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sangat mungkin tiap sekolah memiliki variasi bahasa isyaratnya masing-masing.

Di Indonesia terdapat dua sistem isyarat, yakni bahasa isyarat Indonesia (Bisindo) dan sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI), tetapi yang merupakan bahasa isyarat alamiah adalah Bisindo. Pada kenyataannya, bahasa isyarat bervariasi. Variasi pada bahasa isyarat di Indonesia sejauh ini telah dikembangkan melalui penelitian-penelitian sejak 2012. Di antara penelitian-penelitian tentang variasi bahasa isyarat tersebut adalah Palfreyman (2013), Isma (2012), Suwiryono (2013), dan Bharoto dkk. (2014). Penelitian terhadap variasi bahasa isyarat merupakan usaha penting untuk dokumentasi bahasa. Selain itu, hasil penelitian terhadap variasi bahasa isyarat membawa manfaat praktis, yaitu sebagai panduan juru bahasa isyarat dan untuk mendukung sarana pengajaran bahasa isyarat.

Salah satu penelitian tentang variasi bahasa isyarat adalah isyarat angka dalam bahasa isyarat Indonesia di Yogyakarta (Isma dkk. 2017). Penelitian tersebut merupakan penelitian awal. Penelitian tersebut berkaitan dengan penggunaan variasi leksikal numeral dalam bahasa isyarat di Yogyakarta. Kosakata angka dalam bahasa isyarat merupakan salah satu kelompok konsep makna yang bervariasi tinggi (Stamp et al, 2015). Dalam bahasa isyarat di Yogyakarta, angka dasar 0--5 menggunakan satu tangan, sedangkan angka 6--9 menggunakan dua tangan. Penggunaan satu dan dua tangan tersebut, dalam bahasa isyarat, berpotensi untuk memunculkan variasi fonologis dengan proses penghilangan, asimilasi, dan pemajemukan.

Hasil analisis terhadap isyarat angka 1--20 dalam bahasa isyarat di Yogyakarta menunjukkan bahwa angka dasar 1--5 memiliki variasi yang paling sedikit, begitu pula dengan angka 20 (2 variasi). Sementara itu, angka kompleks, yang melibatkan dua bilangan, yaitu 10 dan 16--19 memiliki variasi isyarat yang paling banyak (5 variasi). Untuk angka 1--5, pembeda antarvariasi adalah orientasi telapak tangan (salah satu elemen fonologis bahasa isyarat). Pada variasi pertama, telapak tangan mengarah ke luar, sedangkan variasi kedua telapak tangan mengarah ke dalam.



V1



V2

**Gambar 1**

**Variasi Isyarat Angka 1 dengan Perbedaan pada Orientasi Telapak Tangan** Sementara itu, angka 20 bervariasi berdasarkan jumlah tangan yang digunakan. Variasi pertama menggunakan 1 tangan (2, lalu 0), sedangkan variasi kedua menggunakan 2 tangan (tangan dominan berisyarat 2 dan nondominan berisyarat 0).

Bilangan 6--9 dan 11--15 memiliki 3 variasi. Untuk angka 6--9, variasi tersebut melibatkan orientasi telapak (ke dalam atau ke luar) dan jumlah tangan





yang digunakan (satu tangan atau dua tangan). Sementara itu, variasi bilangan 11—15 melibatkan orientasi telapak, jumlah tangan, dan gerakan tangan.

Jumlah variasi terbanyak diperoleh pada isyarat 10 dan 16—19. Faktor pembeda antarvariasi angka 10 adalah orientasi, jumlah tangan, dan bentuk tangan. Sementara itu, variasi angka 16—19 meliputi perbedaan bentuk tangan, gerakan, dan jumlah tangan. Bilangan 16—19 berangka dasar 6—9 yang dalam bahasa isyarat itu sendiri dapat saja melibatkan satu tangan atau dua tangan. Dengan demikian, ada kecenderungan tingginya variasi untuk 16—19 karena angka dasar dan isyarat yang menunjukkan puluhan memiliki lebih banyak kemungkinan untuk divariasikan.

Selain penelitian tentang variasi angka dalam bahasa isyarat Indonesia di Yogyakarta, terdapat pengkajian tentang variasi warna yang dilakukan oleh Isma dkk. (2017) dalam bahasa isyarat Indonesia di Yogyakarta. Penelitian tersebut juga merupakan penelitian awal dengan menggunakan data yang sama. Sebuah pengkajian isyarat warna dalam bahasa isyarat Inggris (British Sign Language) yang dilakukan oleh Stamp dkk (2014) menandakan bahwa variasi isyarat warna dalam satu wilayah sangat tinggi, misalnya, isyarat warna ungu terdapat 22 variasi dan isyarat warna abu-abu terdapat 14 variasi (Stamp dkk. 2014 dalam Palfreyman 2016). Tingkat variasi isyarat yang tinggi disebabkan faktor usia, wilayah, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan (Stamp dkk. 214).

Dalam variasi isyarat warna dalam bahasa isyarat Indonesia di Yogyakarta, pengkajian dilakukan dengan menggunakan 13 jenis warna, yaitu cokelat, merah, hitam, putih, kuning, hijau, biru, oranye, merah muda (*pink*), ungu, abu-abu, emas, dan perak.

Hasil data yang berjumlah 118 token isyarat yang telah dikaji menunjukkan bahwa variasi isyarat warna dapat dikategorikan menjadi 4 jenis isyarat, yaitu isyarat berbentuk inisial, isyarat berleksikal ikonik, isyarat berleksikal nonikonik, dan isyarat berbentuk frasa.

Isyarat berbentuk inisial yang didapat dalam data penelitian berjumlah 67 isyarat atau 51% dari keseluruhan variasi isyarat. Variasi isyarat untuk COKELAT, KUNING, BIRU, ORANYE, MERAH MUDA (*PINK*), UNGU, dan ABU-BU mendominasi kategori ini. Di dalam data kategori ini, terdapat dua jenis berbentuk tangan alfabet yang ditemukan untuk membentuk isyarat inisial, yaitu alfabet Bisindo dan alfabet bahasa isyarat Amerika (ASL). Beberapa isyarat yang beralfabet Bisindo ditemukan dalam isyarat COKELAT, ORANYE, UNGU, dan ABU-ABU. Di sisi lain, isyarat yang beralfabet ASL ditemukan dalam isyarat KUNING, BIRU, dan MERAH MUDA (*PINK*). Di bawah ini merupakan contoh isyarat ORANYE menggunakan bentuk tangan yang berhuruf O dalam Bisindo dan contoh isyarat *PINK* yang menggunakan bentuk tangan berhuruf P dalam ASL.

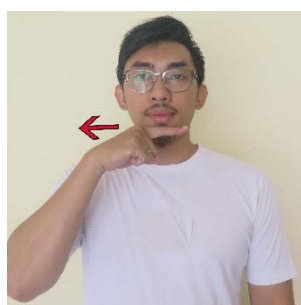


**Gambar 2 Isyarat ORANYE (Bisindo)**



**Gambar 3 Isyarat PINK (ASL)**

Kedua gambar di atas merupakan jenis isyarat yang berbentuk inisial. Gambar 2, ORANGE, menggunakan bentuk tangan yang berhuruf O sesuai dengan alfabet Bisindo dan disertai gerakan melingkar secara berulang, sedangkan gambar 3, PINK, menggunakan bentuk tangan huruf P sesuai dengan alfabet ASL disertai gerakan sentuh tepat di lokasi dagu. Jenis kedua dalam variasi bahasa isyarat warna adalah isyarat berleksikal ikonik. Jenis ini berhubungan dengan ikonisitas yang menyerupai suatu objek atau benda. Dengan kata lain, isyarat jenis ini dapat mengacu pada warna suatu benda atau objek yang direpresentasikan ke dalam isyarat. Jenis ini dapat dilihat dengan isyarat MERAH, HITAM, dan EMAS dalam data. Berikut contoh gambar isyarat MERAH dan HITAM di bawah ini.



**Gambar 4 Isyarat MERAH**



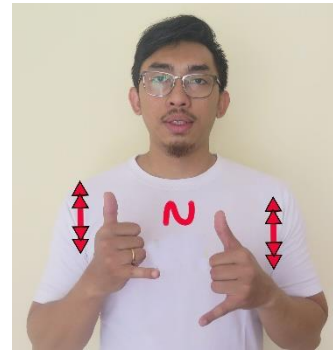
**Gambar 5 Isyarat HITAM**

Dari kedua gambar di atas, dapat kita lihat bahwa isyarat MERAH dan HITAM merepresentasikan warna suatu benda atau objek. Isyarat MERAH dengan bentuk telunjuk di posisi tepat di bawah bibir bawah dan digerakkan ke arah kanan menunjukkan kesesuaian konsep warna bibir yang berwarna merah ketika menggunakan lipstik. Sementara itu, isyarat HITAM di posisi samping rambut dengan bentuk tangan telunjuk dan jempol di awal dan dengan gerakan menutup kedua jari tersebut mengacu pada konsep warna rambut sebagian besar orang-orang Indonesia.

Kebalikan dengan jenis kedua, jenis ketiga ini adalah isyarat berleksikal nonikonik. Isyarat jenis ini menunjukkan ketiadaan hubungan dengan warna suatu benda atau objek. Sangat mungkin berkaitan dengan proses perubahan fonologis. Isyarat, seperti PUTIH dan HIJAU, masuk kategori ini. Contoh gambar kedua isyarat tersebut di bawah ini.



**Gambar 6 Isyarat HIJAU**



**Gambar 7 Isyarat PUTIH**

Dua gambar yang ditunjukkan di atas dapat kita lihat isyarat HIJAU yang berbentuk tangan telunjuk melengkung awal di posisi hidung dan gerakan meluruskan telunjuk. Untuk isyarat PUTIH digunakan dua tangan yang berbentuk tangan jari kelingking dan jempol dan dengan gerakan naik turun secara berlawanan antara tangan kanan dan kiri. Kedua isyarat tersebut menunjukkan bahwa hal ini tidak merepresentasikan warna suatu benda atau objek, melainkan proses fonologis. Diperlukan kajian secara mendalam terhadap isyarat-isyarat dalam kategori ini. Dengan demikian, kita dapat mengetahui asal mula isyarat-isyarat tersebut.

Variasi isyarat jenis terakhir adalah isyarat berbentuk frasa. Beberapa isyarat, seperti EMAS-PUTIH (perak), MERAH-MUDA, HIJAU-MUDA, BIRU-TUA dapat ditemukan dalam data. Berikut ini contoh isyarat EMAS-PUTIH (perak) dan MERAH-MUDA.



**Gambar 8 Isyarat EMAS-PUTIH (Perak)**



**Gambar 9 Isyarat MERAH-MUDA**

Dua contoh isyarat di atas dapat kita bedakan menjadi 2 kategori, yakni isyarat yang merepresentasikan bentuk dan warna suatu benda dan objek dan isyarat yang



merepresentasikan berdasarkan kosakata dalam bahasa Indonesia. Isyarat yang merepresentasikan bentuk dan warna suatu benda dan objek dapat kita lihat dalam gambar 8, EMAS-PUTIH. Terdapat dua isyarat, yaitu emas dan putih yang diartikan sebagai perak. Sementara itu, isyarat yang merepresentasikan berdasarkan kosakata dalam bahasa Indonesia dapat kita lihat dalam gambar 9, MERAH-MUDA. Dua isyarat yang diperagakan, yaitu MERAH dan MUDA dapat kita ketahui bahwa hal itu berdasarkan kosakata dari bahasa Indonesia, seperti merah muda, biru muda, dan hijau muda.

### **Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI)**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, studi bahasa isyarat merupakan bidang penelitian linguistik yang masih tergolong muda jika dibandingkan dengan studi linguistik bahasa lisan di dunia. Lebih dari itu, studi bahasa isyarat di Indonesia baru berkembang pada tahun 2000-an. Sebelum masa tersebut, bahasa isyarat tidak diakui sebagai bahasa alami yang tumbuh dan berkembang di dalam komunitas tuli. Oleh karena itu, dibentuk sebuah sistem komunikasi buatan yang ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah luar biasa tipe B untuk murid-murid tuli, yaitu sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI).

SIBI diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1997 dalam bentuk kamus. Pada bagian pengantar kamus tersebut disebutkan bahwa kosakata isyarat yang menjadi lema di dalam kamus SIBI diambil dari berbagai sumber, yaitu kamus-kamus bahasa isyarat yang dikembangkan oleh Yayasan Pendidikan Zinnia di Jakarta, organisasi pendidikan luar biasa di Jakarta, dan Yayasan Karya Mulya Surabaya, Jawa Timur. Selain itu, disebutkan juga bahwa lema di dalam kamus juga diambil dari bahasa isyarat Amerika (ASL), bahasa isyarat Inggris (BSL), bahasa isyarat yang digunakan di Singapura, dan bahasa isyarat lokal yang dikumpulkan oleh para guru di sekolah-sekolah luar biasa. Pernyataan bahwa kosakata dalam kamus SIBI diambil dari beberapa kamus yang dikembangkan di beberapa yayasan dan organisasi pendidikan tuli mengindikasikan bahwa lema-lema tersebut diadaptasi dari ASL karena yayasan dan organisasi tersebut menggunakan ASL dalam kegiatan belajar-mengajar.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, SIBI merupakan representasi bahasa Indonesia lisan dalam bentuk isyarat. Hal tersebut berarti bahwa struktur bahasa Indonesia lisan dipindahkan ke dalam modalitas isyarat, yaitu ke dalam gerakan dan bentuk tangan. Oleh karena itu, pada SIBI terdapat afiksasi yang merepresentasikan afiksasi dalam bahasa Indonesia. Pola kalimat dalam SIBI pun mengikuti pola kalimat bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh pembentukan kata dan kalimat dalam SIBI.

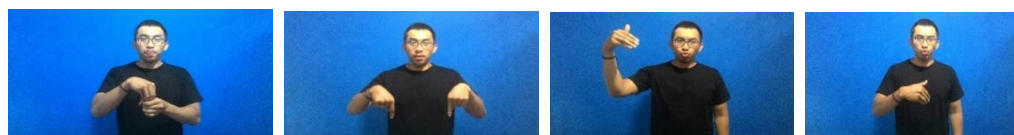
---

<sup>2</sup> Pernyataan ini merupakan hasil wawancara informal saya dengan Ibu Sarina S. Danuningrat, seorang penggiat pendidikan tuli dan juga anak dari Ibu Baron Sutadisastra, seorang guru yang memperkenalkan ASL di Indonesia. Ibu Baron menggunakan ASL di sekolah Zinnia pada tahun 1978 dan kemudian membawanya ke sekolah Yayasan Karya Mulya di Surabaya. Kemampuan Ibu Baron menggunakan ASL diperoleh dari studinya di Gallaudet University, sebuah universitas tuli di Washington DC, yang menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa pengantarnya.



'Arief sedang dalam perjalanan ke sini'.

Dapat dilihat dari contoh kalimat di atas bahwa pembentukan kata dan kalimat dalam SIBI sepenuhnya mengikuti bahasa Indonesia lisan. Di dalam SIBI, afiksasi direpresentasikan dengan .... Berbeda dengan SIBI, bahasa isyarat Indonesia merupakan bahasa alami yang tumbuh dan berkembang di komunitas tuli dan memiliki perbedaan atau variasi antara satu komunitas tuli dan komunitas tuli lainnya. Bahasa isyarat telah dianggap sebagai bahasa ibu bagi orang-orang tuli walaupun sebagian besar anggota komunitas tuli lahir dari orang tua dengar. Bahasa isyarat dianggap bahasa yang paling nyaman dan komunikatif untuk orang tuli karena sepenuhnya menggunakan modalitas visual dan gestur. Karena bersifat visual, pesan yang disampaikan dalam bahasa isyarat dapat diterima oleh mata secara simultan sehingga bahasa isyarat tidak selalu mengandalkan urutan atau sekuen konstituen-konstituennya seperti bahasa lisan. Sementara itu, sifat bahasa isyarat yang diproduksi dengan gestur memungkinkan penyampaian pesan atau kalimat juga dibangun secara simultan karena melibatkan lebih banyak bagian tubuh, yaitu kedua tangan, gerakan badan, dan ekspresi wajah. Berikut adalah contoh pembentukan kata dan kalimat dalam bahasa isyarat.



'Arief sedang menuju ke sini sekarang.'

### **Bahasa Isyarat sebagai Bidang Penelitian**

Situasi kebahasaan bahasa isyarat tentunya berbeda dengan situasi kebahasaan bahasa lisan, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Bahasa isyarat menghadapi tantangannya tersendiri sebagai sebuah bahasa kelompok Tuli sebagai minoritas. Berbeda dengan bahasa lisan, bahasa isyarat belum mendapat pengakuan dari masyarakat luas sebagai sebuah bahasa. Selain itu, SIBI yang ada saat ini yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai sistem komunikasi di sekolah-sekolah membuat bahasa isyarat makin terpinggirkan. Situasi tersebut membuat bahasa isyarat sebagai titik berat identitas komunitas tuli. Perjuangan kaum tuli sebagai sebuah kelompok budaya juga berpusat pada tuntutan agar bahasa isyarat dapat diakui dan digunakan di berbagai aspek kehidupan kaum tuli, termasuk dalam bidang pendidikan.



Berdasarkan situasi kebahasaan bahasa isyarat tersebut, komunitas tuli memandang tinggi kemampuan bahasa isyarat, baik seorang anggota komunitas tersebut maupun orang di luar komunitasnya (orang dengar). Kemampuan berbahasa isyarat tersebut menjadi kunci penting dalam melakukan pendekatan kepada komunitas tuli. Oleh karena itu, sangat penting pula bagi seorang peneliti untuk mahir dalam bahasa isyarat.

Kemampuan bahasa isyarat seorang peneliti atau orang lain yang bekerja sama dengan orang tuli dapat mendekatkan jarak sosial dan psikologis di antara keduanya. Penutur sebuah bahasa minoritas yang terpinggirkan biasanya membatasi dirinya dengan orang di luar komunitasnya sehingga mempelajari bahasa komunitas tersebut dapat menjadikan seseorang sebagai “sekutu” dan bukan lagi sebagai orang asing (Fischer 2009). Bagi seorang peneliti bahasa isyarat, kemahiran berbahasa isyarat dapat memberikan akses ke dalam komunitas tuli sehingga anggota komunitas tersebut dapat menumbuhkan rasa percaya bahwa peneliti mempunyai tujuan positif dalam penelitiannya.

Berdasarkan pengalaman meneliti bahasa isyarat, menggunakan bahasa isyarat secara mahir sangat bermanfaat. Ketika bertemu orang tuli, saya sering dikira sebagai orang tuli dan terkadang status saya sebagai orang dengar atau tuli tidak dipertanyakan. Setelah mereka mengetahui bahwa saya adalah orang dengar yang bisa berbahasa isyarat, komunikasi yang terbangun dan tanggapan positif dari orang tuli didapat. Hal tersebut akan mempermudah tim peneliti apabila pada waktu tertentu melakukan penelitian terhadap bahasa isyarat yang digunakan orang tuli tersebut.

#### 1. Memilih konsultan penelitian

Konsultan dalam sebuah penelitian bahasa isyarat tentunya, secara ideal, adalah penutur jati bahasa isyarat tersebut (tuli). Fischer (2009) mengatakan bahwa konsultan tuli yang ideal berasal dari keluarga tuli, yaitu mempunyai orang tua tuli atau setidaknya saudara kandung tuli yang menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa pertamanya. Akan tetapi, jumlah orang tuli yang berasal dari keluarga tuli sangat kecil. Di Amerika Serikat, hanya 5% dari populasi orang tuli yang berasal dari keluarga tuli (Fisher 2009), 95% sisanya berasal dari keluarga dengar, yaitu mempunyai orang tua dengar. Sementara itu, di Indonesia sangat sulit ditemukan orang tuli dari keluarga tuli. Berdasarkan pengalaman selama meneliti, jika ada orang tuli yang berorang tua tuli, tidak serta-merta orang tuli tersebut berbahasa isyarat sebagai bahasa ibunya. Hal itu terkait dengan stigma bahasa isyarat yang masih dipandang negatif, bahkan oleh sebagian orang tuli sendiri.

Kemungkinan lain dalam memilih konsultan bahasa isyarat adalah keterpaparan terhadap bahasa isyarat dan latar belakang pendidikan. Sebagian besar orang tuli di Indonesia, seperti juga yang terjadi di dunia, lahir dari keluarga dengar sehingga mereka baru terpajan dengan bahasa isyarat ketika masuk ke sekolah luar biasa tipe B untuk tuli. Di sekolah tersebut anak-anak tuli bertemu untuk pertama kalinya dan berinteraksi sehingga bahasa isyarat mulai tumbuh dan berkembang di sekolah tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar orang tuli baru terpajan terhadap bahasa isyarat ketika mereka setidaknya berumur 6 tahun. Selain usia, yang pertama kali menggunakan bahasa isyarat harus diketahui pula frekuensi penggunaan bahasa isyarat dalam kehidupan sehari-harinya. Makin sering menggunakan bahasa isyarat



tentunya akan makin peka seorang tuli terhadap bahasa tersebut, baik kepekaan terhadap struktur maupun nilai-nilai pragmatik atau sociolinguistik bahasa tersebut.

Hal terpenting yang harus dimiliki seorang konsultan penelitian bahasa isyarat adalah kemampuan metalinguistik. Kemampuan metalinguistik di dalam hal ini berarti kemampuan untuk memberi jarak antara dirinya dan situasi tertentu dalam penelitian serta memiliki kemampuan menilai kegramatikalannya suatu bangun bahasa, alih-alih hanya berfokus pada pesan yang terkandung dalam bentuk bahasa tersebut (Fisher 2009). Selain itu, kemampuan dalam membedakan struktur bahasa isyarat dan struktur bahasa lisan menjadi ukuran penting dalam memilih konsultan tuli. Konsultan penelitian yang pernah bekerja sama dengan saya sering kali membandingkan bentuk atau pola sebuah kalimat dalam bahasa isyarat dan bahasa lisan yang dikuasainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsultan tersebut mahir dalam dua bahasa atau bilingual. Kedwibahasaan konsultan tersebut disebabkan oleh keterpaparan yang cukup seimbang antara dirinya sebagai anggota komunitas tuli dan pergaulannya dengan teman, keluarga, atau kerabat dengar. Kemahiran dalam dua bahasa ini membentuk kepekaan seorang tuli dalam membedakan kedua bahasa tersebut.

## 2. Memilih informan

Informan sebuah penelitian bahasa harus memenuhi kriteria tertentu. Salah satu kriteria utamanya adalah status informan tersebut sebagai penutur jati bahasa yang diteliti. Situasi bahasa isyarat, seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, tidaklah sama dengan bahasa lisan. Sebagian besar orang tuli lahir dari keluarga dengar dan baru mengenal bahasa isyarat pada usia 6 tahun ketika bersekolah di sekolah luar biasa. Dengan demikian, kriteria informan yang berbahasa ibu bahasa isyarat tidak mudah untuk dipenuhi.

Seperti memilih konsultan penelitian, informan bahasa isyarat dipilih berdasarkan frekuensinya menggunakan bahasa isyarat dalam kesehariannya. Selain itu, tingkat keterlibatan seorang tuli dalam kegiatan-kegiatan dalam komunitas tuli juga menjadi pertimbangan pemilihan informan. Makin sering seseorang berinteraksi dan berkegiatan di dalam komunitas tuli diasumsikan makin baik kemampuan berbahasa isyaratnya.

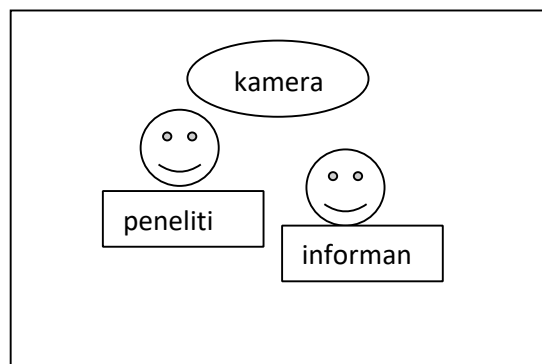
Di Indonesia masih terdapat stigma bahwa bahasa isyarat merupakan bahasa “rendah” dan jika dapat berbahasa Indonesia, seorang tuli tersebut berarti pintar. Pandangan seperti ini dapat menjadi penghalang seorang peneliti dengar yang ingin mengambil data bahasa isyarat. Sangat mungkin, bahwa seorang informan tuli, walaupun bahasa isyaratnya baik, menuturkan kalimat bahasa isyarat dengan pola bahasa lisan karena khawatir jika peneliti tidak memahami ujaran informan tersebut. Hal tersebut dapat mengakibatkan tidak didaptkannya data bahasa isyarat yang alamiah atau sesuai dengan penggunaan bahasa isyarat. Oleh karena itu, selain pemilihan informan yang sehari-hari menggunakan bahasa isyarat, pembuatan instrumen atau materi elisitasi data harus terhindar dari pengaruh bahasa lisan, seperti menghindari penggunaan kata-kata bahasa lisan ketika menanyakan sebuah konsep dalam bahasa isyarat.

## 3. Pengaturan teknis

Berdasarkan penjelasan tentang situasi kebahasaan bahasa isyarat di Indonesia sebelumnya, dapat diketahui bahwa peran konsultan tuli dalam sebuah penelitian

linguistik bahasa isyarat sangat penting. Dalam sebuah elisitasi data bahasa isyarat, informan dapat saja menggunakan bahasa isyarat yang dicampur bahasa lisan karena orang tersebut sadar bahwa pengambilan data dilakukan oleh peneliti dengar. Oleh karena itu, seorang konsultan tuli juga dapat berperan sebagai pengambil data yang langsung berhadapan dengan informan tersebut. Dengan kehadiran orang tuli sebagai pewawancara atau pengambil data, informan tuli cenderung merasa lebih nyaman dan lebih terbuka dalam mengekspresikan sesuatu, terlebih jika yang menjadi target data adalah sebuah narasi.

Pengambilan data bahasa isyarat tentu saja harus menggunakan peralatan video kamera. Jika data dielisitasi melalui interaksi dengan peneliti, baik informan maupun peneliti direkam oleh video kamera dengan pengaturan yang memungkinkan, isyarat informan terlihat jelas. Pengaturan umum ketika mengambil data bahasa isyarat adalah sebagai berikut.



**Gambar 10 Pengaturan Posisi Peneliti, Informan, dan Kamera  
(Diadaptasi dari Fischer, 2009)**

Berikut merupakan contoh pengaturan latar pengambilan data leksikal bahasa isyarat di Yogyakarta dengan seorang peneliti tuli. Berbeda dengan gambar sebelumnya, informan dan peneliti duduk sejajar dengan materi elisitasi terlihat dengan jelas. Hal tersebut bermanfaat untuk pengecekan dan konfirmasi kembali tentang data ketika pengolahan.



**Gambar 11**

#### **Proses Wawancara Peneliti dan Informan dengan Kartu Bergambar**

#### **4. Timbal balik kepada komunitas tuli**

Dalam meneliti bahasa isyarat, seperti juga bahasa yang hampir punah, kepercayaan dari komunitas pengguna bahasa tersebut perlu dibangun. Komunitas tuli hidup di tengah-tengah stigma negatif dan tekanan bahasa mayoritas, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah lisan. Hambatan komunikasi dengan keluarga, kerabat, dan hambatan di tempat-tempat umum membuat komunitas tuli cenderung





menutup diri dengan dunia luar. Untuk itu, seorang peneliti bahasa isyarat sebaiknya memiliki kemampuan bahasa isyarat untuk dapat mendekati komunitas tuli; mampu berbahasa isyarat saja tidak cukup. Orang-orang tuli mungkin saja masih dapat merasa tereksplorasi dengan penelitian yang dilakukan, misalnya, karena mereka tidak dapat memahami hasil penelitian mengenai bahasa mereka sendiri atau karena tidak adanya tindak lanjut kepada komunitas setelah penelitian dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan timbal balik kepada komunitas tuli.

Permasalahan penggunaan bahasa isyarat terletak pada belum dikenalnya bahasa isyarat itu sendiri oleh masyarakat luas, bahkan masih terdapat orang tuli yang merasa “enggannya” menggunakan bahasa isyarat di tempat umum walaupun sudah didampingi seorang juru bahasa. Selain itu, Bisindo yang digunakan sehari-hari oleh anggota masyarakat tuli belum diangkat menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan tuli di sekolah-sekolah luar biasa karena pemerintah sudah menetapkan SIBI sebagai bahasa pengantarnya. Situasi tersebut membuat bahasa isyarat di Indonesia makin terpinggirkan, begitu pula penggunaannya. Dengan demikian, melalui penelitian, bahasa isyarat dapat dikenal dan penggunaannya dapat diberdayakan.

Salah satu langkah pertama dalam memberdayakan komunitas tuli sebagai bentuk timbal balik adalah melibatkan mereka dalam proses penelitian, yaitu sebagai konsultan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebagai penutur jati, orang tuli dapat menjadi konsultan penelitian bahasa isyarat. Agar seseorang dapat menjadi konsultan yang lebih baik, pelatihan dasar linguistik dapat diberikan, baik secara formal melalui jenjang pendidikan sarjana maupun nonformal melalui pelibatan dalam pelatihan atau tim penelitian.

Salah satu bentuk timbal balik yang juga dapat dilakukan adalah pembuatan kamus bahasa isyarat yang dilakukan oleh orang tuli melalui pelatihan pembuatan kamus. Para tuli dilatih untuk membuat kamus bahasa isyaratnya sesuai dengan kaidah pembuatan kamus (leksikografi) bahasa isyarat. Selain sebagai bentuk dokumentasi bahasa isyarat dan variasinya, komunitas tuli juga dapat menjadi berdaya untuk menggali khazanah bahasa ibunya sendiri.

## **Penutup**

Penelitian terhadap bahasa isyarat di Indonesia masih sangat terbuka karena hasil penelitian dalam bidang tersebut masih sedikit dan bahasa isyarat di negeri ini bervariasi. Penelitian bahasa isyarat, khususnya yang berfokus pada variasi dalam berbagai tataran linguistik, sangat diperlukan sebagai usaha pendokumentasian bahasa isyarat yang ada di Indonesia. Dengan terdokumentasikannya bahasa isyarat Indonesia dengan berbagai variasinya, bidang lain, seperti penjurubahasaan bahasa isyarat dan pengajaran bahasa isyarat dapat dikembangkan. Dengan demikian, kedudukan bahasa isyarat makin kuat sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia dan bahasa tersebut dapat diakui dan diterima di masyarakat umum.

Penelitian terhadap bahasa minoritas tentunya memiliki teknik tersendiri. Dalam kasus bahasa isyarat, pemberdayaan orang tuli sebagai peneliti menjadi sangat penting dan mutlak diperlukan untuk mendapatkan data faktual tentang penggunaan bahasa isyarat. Selain itu, komitmen peneliti dalam memberdayakan komunitas tuli juga sangat dibutuhkan sebagai timbal balik terhadap komunitas yang ditelitinya.



### Daftar Pustaka

- Bharoto, Adhi K. et al. (2014). *Bahasa Isyarat Yogyakarta: Kamus Pendamping Buku Pedoman Siswa 1 Tingkat 1*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1997). *Sistem Isyarat Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fischer, Susan. (1975). Influences on Word-Order Change in American Sign Language. In C. Li, (ed), *Word order and word order change*. Austin: University of Texas. 1—25.
- Isma, Silva Tenrisara Pertiwi. (2012). “Signing Varieties in Jakarta and Yogyakarta: Dialect or Separate Languages?” MA Thesis. The Chinese University of Hong Kong.
- Isma, Silva Tenrisara Pertiwi. (2017a). Variasi Isyarat Angka dalam Bahasa Isyarat Yogyakarta: Sebuah Studi Awal. Dalam Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya 15, hlm. 383—392.
- Isma, Silva Tenrisara Pertiwi. (2017). Variation of Colour Signs in Indonesian Sign Language (Bisindo) in Yogyakarta: A Preliminary Study. Unpublished Manuscript. Disajikan di International Conference on Linguistics and Arts, Padang (2017).
- Johnston, Trevor. (2003). BSL, AUSLAN, and NZSL: Three Signed Languages or One? In Baker, A., van den Bogaerde, B. and Crasborn, O. (eds.), *Cross-Linguistic Perspectives in Sign Language Research: Selected Papers from TISLR 2000*. International Studies on Sign Language and Communication on the Deaf 41. 47—69.
- McKee, David and Kennedy, Greame. (2000). Lexical Comparison of Signs from American, Australian, British, and New Zealand Sign Languages. In Emmorey, Karen and Lane, Harlan (eds.). *The Signs of Language Revisited: An Anthology in Honor of Ursula Bellugi and Edward Klima*. Mahwah, N.J.: Erlbaum. 49—76.
- McKee, David, Rachel McKee, and George Major. 2006. “Sociolinguistics Variation in NZSL Numerals”. Dalam 9<sup>th</sup> Theoretical Issues in Sign Language Research Conference, Florianopolis, Brazil. [www.editor-arara-azul.com](http://www.editor-arara-azul.com), diakses pada 26 Januari 2015.
- Padden, Carol A. (2011). Sign Language Geography. In Mathur, Gaurav, and Jo Napoli, Donna (eds.), 19—37.
- Palfreyman, Nicholas Barrie. (2013). “Form, Function, and the Grammaticalisation of Completive Markers in the Sign Language Varieties of Solo and Makassar.” [www.researchgate.net/profile/Nick\\_Palfreyman/publication](http://www.researchgate.net/profile/Nick_Palfreyman/publication), accessed on March 3, 2016.
- Palfreyman, Nicholas Barrie. (2016). *Colour Terms in Indonesian Sign Language Varieties: A Preliminary Study in Semantic Fields in Sign Languages: Colour, Kinship and Quantification*. De Gruyter, pp. 269—300.
- Stamp, Rose et al. “Sociolinguistic Variation and Change of British Sign Language Number Signs.” [www.purdue.edu/tislr10](http://www.purdue.edu/tislr10), diakses pada 16 Februari 2015.
- Suwiryo, Adhika Irlang. (2013). “Mouth Movement Patterns in Jakarta and Yogyakarta Sign Language: a Preliminary Study”. MA Thesis. The Chinese University of Hong Kong.





**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 3 Kelompok 7**

Pembicara : Silva Isma dan Adhi Kusumo Bharoto  
Judul Makalah : “Ragam dan Kamus Bahasa Isyarat di Indonesia”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 10.15—11.45  
Moderator : Toha Machsum, M.Ag.  
Pencatat : 1. Septimariani  
                  2. Vita Luthfia Urfa

**Rangkuman Penyajian Makalah**

Bahasa dapat saling memberikan informasi, membuat keputusan, ataupun mengontrol emosi. Jika anak tuli tidak mendapatkan bahasa pertamanya, perkembangan kognitifnya akan bermasalah. Bahasa isyarat sudah ada sejak tahun 1950-an. Bahasa isyarat memiliki banyak variasi, tetapi tidak menimbulkan perbedaan salah pengertian. Angka kelahiran anak tuli di Indonesia 1:1.000. Kemampuan berbahasa isyarat anak antara yang satu dan yang lainnya berbeda-beda. Bahasa isyarat berupa oral (berbicara) atau SIBI dapat memengaruhi pengetahuan berbahasa isyarat terhadap orang tuli. Media yang digunakan untuk bahasa isyarat banyak variasinya dan dapat berkembang di sekolah ataupun di masyarakat.

1. BISI adalah buku yang digunakan untuk membantu menerjemahkan maksud dan tujuan dalam bentuk isyarat, termasuk imbuhan prefiks dan sufiks. Kosakata bahasa isyarat Indonesia dan bahasa isyarat Amerika berbeda. BISI digunakan di sekolah luar biasa. Bahasa isyarat bersifat simultan. Orang tuli melihat sesuatu secara keseluruhan dengan penglihatan.
2. Variasi kompleks dengan menggunakan dua angka. Bahasa isyarat memiliki banyak variatif dan juru bahasa dapat memilih variasi yang digunakan untuk mengungkapkan komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Orang tuli memiliki daya ungkap yang luar biasa. Bahasa isyarat dalam dijadikan penelitian dengan melibatkan orang tuli dengan sistem validitas, bidang-bidang praktis, dan juru bicara.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Nuni  
Instansi : UPI Bandung

**Pertanyaan:**

Apakah dalam bahasa isyarat berhubungan dengan budaya atau tidak? Apakah bahasa daerah yang satu akan berbeda dengan bahasa daerah yang lain?

**Jawaban:**

Bahasa isyarat sangat memengaruhi budaya karena letak geografisnya menentukan tradisi yang ada dalam daerah tersebut. Perbedaan budaya tidak memengaruhi



antarkomunikasi. Penggunaan bahasa isyarat dapat mencapai kesepakatan antara orang tuli dan juru bicara.

SIBI yang digunakan di sekolah keliru dan dipaksakan. Anak tuli diajarkan berbahasa setelah masuk sekolah dan terlambat. Tidak diberi kesempatan bahasa ilmiah yang tercetak. Budaya termasuk pencerdasan. Bahasa isyarat digunakan oleh setiap orang sejak dini. Kamus yang digunakan dalam anak-anak tuli Bisindo. Proses pencerdasan dimulai dari bayi. Guru tidak sepenuhnya mengenal SIBI

**Isu-Isu Penting:**

1. Mencerdaskan anak tuli tanpa pandang kekurangan yang dimilikinya sehingga anak tuli dapat maju dan berkembang.
2. Badan Bahasa melalui UPT yang berada di daerah bekerja sama untuk membuat bahasa isyarat daerah untuk orang tuli dengan mengundang juru bicara, orang tuli, dan pemangku kepentingan.
3. Badan Bahasa membuat kamus bahasa isyarat Indonesia untuk memudahkan orang tuli dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kosakata yang digunakan orang tuli dalam berbicara dengan lawan bicara harus memiliki kesepakatan agar maksud dan tujuannya dapat tercapai dan dapat mencapai kesepakatan dalam penggunaannya.
4. Pemerintah melalui pihak sekolah memfasilitasi juru bicara di sekolah untuk orang tuli yang bersekolah di sekolah umum agar tidak merasa tertinggal pelajaran di sekolah.



#### **4. Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Mengembalikan *Di* Ke Ruang Publik**

### **PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK MENGEMBALIKAN *DI* KE RUANG PUBLIK**

**Uu Suhardi**

Redaktur Bahasa *Tempo*

Di banyak tempat bahasa Indonesia tergusur oleh bahasa Inggris. Namun, ada yang lebih memprihatinkan, yakni banyaknya pemakaian bahasa Indonesia yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa. Ruang publik menunjukkan hal itu. Bisa kita katakan, mutu pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik masih rendah. Makalah ini menyajikan berbagai contoh penggunaan bahasa Indonesia yang menyimpang atau bermutu rendah itu. Makalah ini juga mencoba mencari penyebabnya sekaligus memberikan saran untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia, khususnya di ruang publik.

#### **BAHASA KITA DI RUANG PUBLIK**

Mari kita berselancar di jalan-jalan kota di Indonesia. Ruang publik kita dipenuhi bahasa asing (Inggris). Bahasa Indonesia tergusur di banyak tempat. Di jalan-jalan kota besar, juga kota kecil, terpampang nama-nama gedung, pusat belanja, sarana umum, papan pengumuman, spanduk, dan sebagainya yang menggunakan bahasa Inggris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terabaikan, seolah-olah tak berlaku atau mungkin memang tak diketahui. Pasal 36 ayat 3 undang-undang tersebut menyatakan, “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.” Juga pasal 38 ayat 1, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.”

Seruan pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarkan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing”, yang belakangan terus didengung-dengungkan, seperti hanya bergaung di kalangan tertentu, bukan di masyarakat secara umum.

Lihatlah pusat-pusat belanja di Jakarta. Nama Plaza Senayan dan Kota Kasablanka, misalnya, hanya bisa menyelip di antara puluhan nama asing, seperti Senayan City, Pejaten Village, Pondok Indah Mall, dan Grand Indonesia.

Data yang saya peroleh tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di lima belas provinsi di Indonesia (finalis Adibahasa) menegaskan hal itu. Sembari memandangi foto-foto dalam data itu, saya, sebagai salah seorang juri Adibahasa, seolah-olah sedang berwisata di luar negeri. Bahasa Indonesia tampak diremehkan di negeri sendiri. “Nilai jual”-nya dikalahkan oleh bahasa Inggris. Kita seakan-akan tidak percaya diri (tak yakin) berbahasa Indonesia. Namun, sebenarnya, ada yang lebih memprihatinkan ketimbang pengutamakan bahasa Inggris itu. Ketika nama-nama dan pengumuman atau informasi itu ditulis dalam bahasa Indonesia, ejaannya

tidak tertib dan kerap tidak sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia.

Penyebabnya, menurut saya, sama: kurangnya kecintaan dan kebanggaan kita kepada bahasa Indonesia. Karena tak cinta, tak ada keinginan mempelajari, merawat, dan mengembangkannya, apalagi ada anggapan bahwa penguasaan bahasa Indonesia akan berlangsung secara alamiah. Anggapan itu mesti diubah. Agar dapat dikuasai, bahasa Indonesia harus dipelajari.

Apakah ada yang salah dengan pendidikan kita? Rasanya tidak. Bahasa Indonesia diajarkan sejak pendidikan dasar, bahkan soal kata depan, contohnya, sudah diajarkan di kelas I sekolah dasar. Kurikulum pendidikan kita pun (Kurikulum Tiga Belas atau Kurtilas) menekankan hal itu. Namun, lihatlah papan atau spanduk berisi informasi atau peringatan di ruang publik. Kata depan *di*, misalnya, seolah-olah hilang atau dikucilkan. Penulisannya kerap digabungkan dengan kata di belakangnya. Berikut ini contohnya (*dijalan*, *disepanjang*, dan *dimana*).



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Sebaliknya, awalan *di-* justru tak jarang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Saya sertakan dua contohnya (*di meriahkan* dan *di sewakan*).





Foto 4



Foto 5

Partikel *pun* juga kerap ditulis tidak sesuai dengan kaidah. Seharusnya terpisah dari kata yang mendahuluinya, *pun* sering sekali ditulis serangkaian dengan kata di depannya. Di bawah ini contohnya (*apapun* dan *siapapun*).



Foto 6



Foto 7

Bahkan, untuk penulisan yang sederhana pun, yang rujukannya bisa dilihat di kamus, kekeliruan acap kita temukan (*apotik, praktek, dan komplek*).



Foto 8



Foto 9

Itu “hanya” soal penulisan kata depan, awalan, partikel, dan kata serapan. Kita belum berbicara tentang bentukan kata, apalagi susunan kalimat. Upaya peningkatan mutu pemakaian bahasa tentu mesti menyeluruh, tetapi fokus saya ke hal-hal dasar dahulu. Sebab, kalau kita tak bisa membedakan hal yang mendasar seperti kata depan dan awalan, bagaimana dapat menyusun kalimat yang benar, apalagi yang efektif?

Selain di ruang publik, saya akan sedikit menyoroti penggunaan bahasa di dalam dokumen resmi dan di media massa untuk melihat tingkat pemahaman bahasa kita secara umum. Data tentang dokumen resmi pemerintah daerah (provinsi) yang saya peroleh menunjukkan banyaknya kekeliruan dalam berbahasa. Saya sertakan dua contoh surat di bawah ini (*dilingkungan, di permaklumkan, dan di laksanakan*).

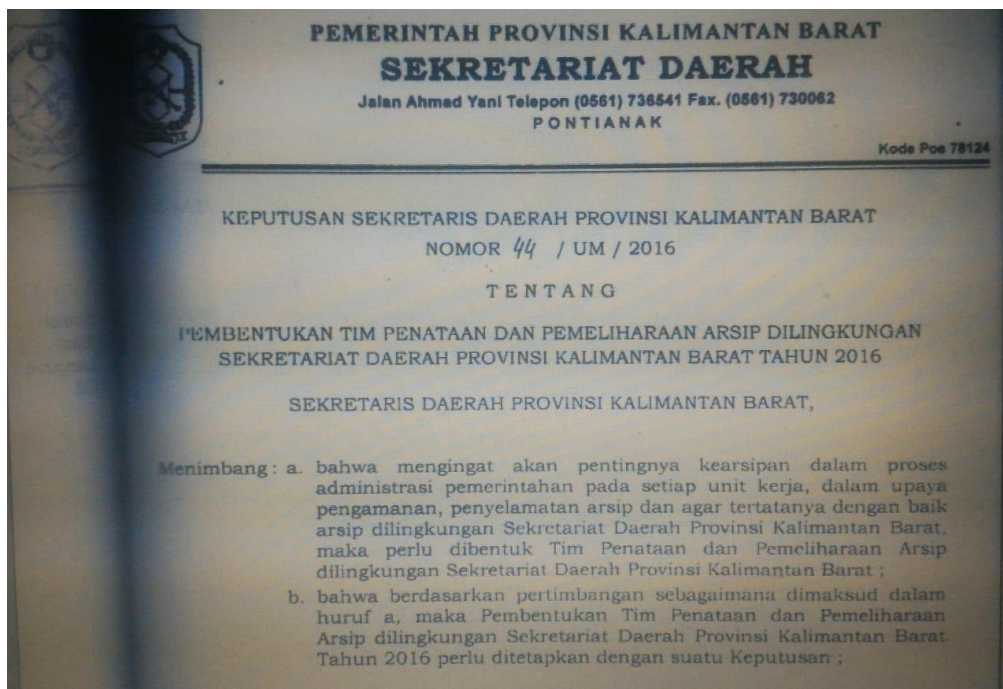


Foto 10





Apakah berbagai kekeliruan atau pelanggaran itu terjadi karena tidak adanya sanksi? Mungkin sanksi bisa meminimalkan pelanggaran. Namun, ketika pemberi sanksi lengah, pelanggaran kembali terjadi. Itulah yang kita lihat sehari-hari di jalan-jalan Jakarta. Lalu lintas tampak semrawut, terutama pada jam-jam sibuk karena banyak pengendara yang melakukan pelanggaran, misalnya, melawan arus atau menerobos lampu merah.

Kemudian, dalam soal pelanggaran berbahasa, siapa yang berhak memberikan sanksi? Lebih tepatnya, siapa yang berhak mengatakan ini benar dan itu salah? Kalau soal pemakaian bahasa asing yang lebih diutamakan ketimbang bahasa Indonesia, apalagi yang dilakukan lembaga pemerintah, penertibannya mungkin lebih mudah. Bagaimana soal pemakaian kata baku dan nonbaku? Bagaimana pula soal penggunaan ejaan?

Lebih-lebih jika para “pelanggar” itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahasa Indonesia. Jadi, mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah atau benar. Dengan demikian, pelanggaran terus terjadi karena pelakunya tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah.

Kegiatan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merupakan contoh yang baik. Mulai tahun ini, mereka (berencana) memberikan teguran tertulis kepada kantor-kantor pelayanan publik yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan aturan dan undang-undang. Tentu dengan catatan: mereka pun mesti menggunakan bahasa yang baik dan benar ketika menyampaikan teguran secara tertulis itu. Dari draf yang saya baca, bahasa mereka pun perlu dibenahi. Dalam hal penulisan kata depan dan awalan, misalnya, mereka masih tidak tertib.

## **PENUTUP**

Kecintaan terhadap bahasa Indonesia, juga kebanggaan kepada bahasa nasional, mesti dipupuk sejak dini. Kesadaran untuk mengutamakan bahasa nasional dan menggunakan bahasa Indonesia yang taat kaidah mesti ditanamkan sejak orang Indonesia belajar di pendidikan dasar dan berkelanjutan di tingkat-tingkat berikutnya. Perlu ditentukan metode pengajaran bahasa Indonesia yang mendukung hal itu.

Pelajar diakrabkan dengan kamus dan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, misalnya. Dengan begitu, kemampuan dan pengetahuan siswa dalam berbahasa Indonesia terus meningkat hingga mereka dewasa. Pemakaian bahasa pun akan meningkat mutunya, terutama di ruang publik, ruang yang bisa didatangi dan dilewati siapa saja.

Harapan kita bersama, antara lain, kembalinya kata depan *di* ke ruang publik. Ketika kata depan *di* tidak pernah lagi ditulis serangkai dengan kata di belakangnya, saat itulah bisa dibilang mutu penggunaan bahasa Indonesia meningkat.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 3 Kelompok 8**

Pembicara : Uu Suhardi  
Judul Makalah : “Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 10.15—11.45  
Moderator : Dra. Ovi Soviaty Rivay, M.Pd.  
Pencatat : Retno Handayani

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Televisi dan radio juga merupakan ruang publik.
2. Ruang publik adalah ruang ketika kita keluar rumah, ada papan rumah, spanduk, nama tempat, plang, jalan, dan lain-lain.
3. Ruang publik kita dipenuhi dengan bahasa Inggris.
4. Istana Wakil Presiden pun masih menggunakan bahasa Inggris (*coffee, tea, refreshing*).
5. Sulit mencari data dalam bahasa Indonesia.
6. Nama lembaga, sarana umum, hotel, dan tempat lain banyak menggunakan bahasa asing.
7. Mutu bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesianya rendah.
8. Penulisan kata depan *di* tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Belum dapat membedakan *di* sebagai kata depan dengan *di* sebagai awalan.
9. Untuk kata baku, masih tertukar, sebagai contoh *praktek* atau *praktik*, *apotek* atau *apotik*, *kompleks* atau *komplek*, *respons* atau *respon*. Mengapa seperti itu? Apa pendidikan atau pengetahuan bahasa Indonesia masih rendah? Cara pengajaran mungkin harus diubah, sejak kecil harus ditanamkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia.
10. Pemahaman kita secara umum masih kurang karena cinta kita terhadap bahasa Indonesia masih kurang.
11. Bahasa Indonesia belum jaya di negeri sendiri. Padahal, 45 negara di luar negeri sudah diajarkan bahasa Indonesia. Seharusnya kita lebih bangga untuk menjayakan bahasa Indonesia di negeri sendiri.
12. Sebaiknya Badan Bahasa menegur lembaga yang menggunakan bahasa asing.
13. Harapan kita, bahasa Indonesia betul-betul digunakan di ruang publik dengan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Abdul Muin  
Instansi : Guru SD di Semarang

**Pertanyaan:**

Kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Sebetulnya di SD sudah diajarkan tentang kata depan. Di akhir paparan, bagaimana langkah-



langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Penyuluhan juga sudah dilakukan di sekolah-sekolah melalui bidang pemasyarakatan.

**Jawaban:**

Badan Bahasa sebetulnya sudah meminta presiden untuk mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Selanjutnya, mungkin akan turun ke pemerintah daerah jika peraturan presiden sudah dibentuk.

**Penanya 2**

Nama : Sahlan Rosidi  
Instansi : Bogor

**Pertanyaan:**

Penggunaan bahasa asing termasuk perumahan, juga mal. Kami di Bogor sudah melakukan sosialisasi terhadap pengusaha. Namun, saat ini legalitas belum ada sampai tingkat bawah yang harus dilakukan tingkat daerah. Menurut Bapak, apa upaya Bapak untuk mengupayakan penggunaan bahasa Indonesia digunakan? Balai bahasa sudah salah menulis, apakah ada kontrol atasan untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut? Apakah mungkin bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional?

**Jawaban:**

Yang memberikan izin seharusnya tetap mengutamakan bahasa Indonesia, bisa dimulai dari perda. Semoga tahun 2045 bahasa Indonesia berjaya. Peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia sedang menunggu untuk disahkan agar ada regulasi.

**Penanya 3**

Nama : Suparno  
Instansi : Balai Bahasa

**Komentar:**

Suasana saat ini lebih sulit karena demokrasi terbuka, pro Orde Baru demokrasi terpimpin. Gerakan menertibkan bahasa Indonesia di ruang publik lebih berwibawa saat itu. Pelibatan dan pemberdayaan potensi daerah, demokrasi sekarang lebih terbuka jadi lebih sulit. Kepatuhan sebagai substansi yang sangat signifikan memiliki strategi yang tepat. Tidak tepat jika sanksi pidana. Karena itu, perlu diatur sanksi yang tepat, misalnya, untuk perusahaan diminta pajak berlipat ganda. Jika sanksi pajak besar untuk lembaga yang tidak mengutamakan bahasa Indonesia, pasti akan mengikuti kepatuhan. Harus ada sanksi dan pengendalian dari pemerintah daerah untuk mengendalikan bahasa Indonesia di ruang publik. Sanksi finansial perlu dikeluarkan.

**Penanya 4**

Nama : T.D. Asmadi  
Instansi : Forum Media Massa



**Tanggapan:**

Saya setuju jika perusahaan harus meminta izin dalam menjalankan iklan dan dikenai pajak. Kalangan birokrasi dan media, kuncinya ada di sekretaris provinsi. Kalangan wartawan, misalnya, redaktornya. Saran penyegaran penyuluhan bahasa untuk redaktur karena redaktur yang menentukan tulisan wartawan. Kita harus keras untuk menanamkan pengutamaan bahasa di ruang publik.

**Jawaban:**

Jika wartawannya juga tidak peduli dengan bahasa Indonesia, ya.

**Penanya 5**

Nama : Prof. Emi

Instansi : PPSDK

**Tanggapan:**

Dalam menangani masalah bahasa Indonesia di ruang publik, gubernur, misalnya, meminta semua reklame diganti menjadi bahasa Indonesia. Di sana artinya peran kepala daerah sangat penting. Badan Bahasa melalui Mendikbud harus bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri untuk mengundang para gubernur atau bupati untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Badan Bahasa fokus hanya di pendidikan dan pengajaran saja melalui guru. Urusan bahasa Indonesia bisa selesai jika dilaksanakan peraturan daerah tentang pengutamaan bahasa Indonesia. Tugas kita menyadarkan para kepala daerah untuk mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik.

**Isu-Isu Penting:**

1. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih didominasi oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Bahasa Indonesia belum jaya di negeri sendiri. Padahal, 45 negara di luar negeri sudah diajarkan bahasa Indonesia. Seharusnya kita lebih bangga untuk menjayakan bahasa Indonesia di negeri sendiri.
2. Kita harus lebih keras dan serius untuk menanamkan pengutamaan bahasa di ruang publik. Penyuluhan bahasa Indonesia terhadap media massa perlu ditingkatkan. Perusahaan yang ingin mengeluarkan papan reklame atau iklan harus meminta izin dan perlu diperhatikan bahasa yang ada di papan reklame tersebut. Mungkin dapat dikeluarkan sanksi berupa sanksi sosial dan sanksi finansial bagi pihak yang tidak mengutamakan bahasa Indonesia. Selain itu, pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia melalui guru sangat berperan dalam pengutamaan bahasa Indonesia. Para siswa perlu ditanamkan rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia.
3. Dalam menangani masalah bahasa Indonesia di ruang publik, gubernur, misalnya, meminta semua reklame diganti menjadi bahasa Indonesia. Di sana artinya peran kepala daerah sangat penting. Badan Bahasa melalui Mendikbud harus bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri untuk mengundang para gubernur atau bupati untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Badan Bahasa fokus hanya di pendidikan dan pengajaran saja melalui guru. Urusan bahasa Indonesia bisa selesai jika dilaksanakan peraturan daerah tentang pengutamaan bahasa Indonesia. Tugas kita menyadarkan para kepala daerah untuk mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik.



## 5. Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial Suatu Tinjauan Linguistik Forensik: Studi Kasus Penggunaan Bahasa dalam Twitter

### PENGGUNAAN BAHASA DALAM MEDIA SOSIAL SUATU TINJAUAN LINGUISTIK FORENSIK: STUDI KASUS PENGGUNAAN BAHASA DALAM TWITTER

*Use of Language in Social Media a Forensic Linguistic Review: Case Study Use Language in Twitter*

**Sriyanto**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
sri2156@yahoo.com

**Abstrak**

Pada beberapa waktu terakhir ini penggunaan bahasa di media sosial (medsos) disemarakkan dengan berbagai penggunaan bahasa yang tidak santun dan bahkan cenderung kasar. Tampaknya, banyak pengguna medsos yang tidak menyadari bahwa tulisan yang diunggahnya dapat dituntut oleh pengguna medsos lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa dalam medsos yang bagaimana yang dapat dituntut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif secara semantis. Metode deskriptif kualitatif secara semantis dipilih karena penelitian ini fokus pada penelitian makna (*meanings*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan fokus penelitian makna adalah bahwa penelitian ini akan memaknai data demi data untuk dapat menemukan hasil penelitiannya. Data penelitian dibatasi pada satu media sosial, yaitu Twitter. Karena penelitian ini merupakan penelitian linguistik forensik, analisis dilakukan dengan penggabungan dua cara, yaitu secara linguistik dan secara hukum. Analisis linguistik dalam penelitian ini hanya dibatasi secara semantis. Adapun pengategorian penggunaan bahasa hanya dibatasi pada kasus penghinaan. Untuk itu, analisis secara hukum menggunakan KUHP tentang Penghinaan, khususnya Pasal 310, 311, 312, dan 315, dan UUIE, khususnya Pasal 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam medsos dapat dibedakan menjadi empat kategori. Keempat kategori itu adalah sebagai berikut: (1) data yang dapat dikategorikan sebagai penistaan atau pencemaran nama baik, (2) data yang dapat dikategorikan sebagai fitnah, (3) data yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan, dan (4) data yang tidak dapat dikategorikan sebagai tulisan yang melanggar hukum.

**Kata-kata kunci:** bahasa medsos linguistik forensik

#### **Abstract**

*In recent times the use of language in social media (medsos) brightened with a variety of language usage that is not polite and even tend to be rude. Apparently, many users of medsos are unaware that the writings they upload can be criminalized by other medsos users. This study aims to describe the use of language in medsos that can be subject to criminal. This study used a descriptive qualitative research methods semantically. Semantically descriptive qualitative method selected for this study because this study focused on the study of meaning (meanings). In this case the meaning of meaningful research focus is that this*



*research will be interpreted data by data to be able to find the results of his research. The research data is limited to one social media, namely Twitter. Since this research is a forensic linguistic study, the analysis is carried out by combining two ways, that is linguistically and legally. The linguistic analysis in this study is only limited semantically. The categorization of the use of language is limited only to cases of insult. To that end, the legal analysis using the Criminal Code on Defamation, particularly Article 310, 311, 312, and 315, and the ITE Law, especially Article 27. The results showed that the use of language in medsos can be divided into four categories. The four categories are as follows: (1) data that can be categorized as defamation or libel, (2) data that can be categorized as slander, (3) data that can be categorized as minor insult, and (4) data which can not be categorized posts that violate the law.*

**Keywords:** *forensic linguistics medsos language*

## **PENDAHULUAN**

Kehadiran media sosial (medsos) dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah bahwa orang dapat berkomunikasi dengan cepat dan murah. Dampak positif ini jelas tidak menimbulkan masalah. Adapun dampak negatifnya adalah adanya kemungkinan menimbulkan rasa ketidaksukaan dari pihak lain. Bahkan, medsos dapat menimbulkan penghinaan atau pencemaran nama baik atau fitnah yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Dampak negatif inilah yang banyak menimbulkan masalah.

Secara umum dampak negatif dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu dampak negatif yang bersifat individu dan dampak negatif yang bersifat kolektif. Dampak negatif yang bersifat individu dapat dibedakan menjadi dua macam pula, yaitu individu sebagai pihak pemberi ide atau pemberi gagasan dan individu sebagai penerima ide atau penerima gagasan. Komunikasi yang terbatas antarindividu itu terjadi dalam medsos yang terbatas pada dua pihak yang bersangkutan. Dampak negatif yang bersifat kolektif jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan dampak negatif yang bersifat individu. Jika ada ketersinggungan antarindividu, persoalan hanya berkaitan dengan kedua individu yang bersangkutan. Namun, jika ketersinggungan itu terjadi menyangkut komunitas yang sangat banyak, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Ketersinggungan massal dapat berakibat kemarahan yang bersifat kolektif. Jika itu terjadi, keresahan atau bahkan kerusuhan yang bersifat massal juga sangat mungkin terjadi. Fenomena penggunaan bahasa dalam medsos yang menarik perhatian publik itu merupakan hal yang menarik untuk diteliti.

Penelitian ini membatasi diri pada salah satu jenis medsos, yaitu jejaring sosial atau *social networks*. Jenis medsos ini pun banyak macamnya. Dari berbagai macam itu hanya satu jenis yang dijadikan objek penelitian, yaitu Twitter. Jenis medsos itu memiliki data yang tidak terbatas. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik data terus bertambah. Hal itu berarti bahwa data medsos tidak pernah berkurang, kecuali medsos itu ditutup.

Setiap jenis medsos sebagaimana yang telah disinggung di atas mempunyai data yang hampir tidak terbatas jumlahnya, baik dilihat dari sisi waktu penggunaan media itu maupun dilihat dari sisi jumlah data yang akan ditemukan. Jika jenis medsos perlu dibatasi dalam penelitian ini, data yang akan diambil sebagai sampel dalam penelitian ini juga perlu dibatasi. Penelitian ini akan mengambil data di



internet sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam kurun waktu tertentu akan dapat diperoleh data yang cukup memadai.

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Penggunaan bahasa dalam medsos yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai penistaan atau pencemaran nama baik?
- 2) Penggunaan bahasa dalam medsos yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai fitnah?
- 3) Penggunaan bahasa dalam medsos yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan?
- 4) Penggunaan bahasa dalam medsos yang seperti apa yang tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan?

Seturut dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) mendeskripsikan penggunaan bahasa dalam medsos yang dapat dikategorikan sebagai penistaan atau pencemaran nama baik; (2) mendeskripsikan penggunaan bahasa dalam medsos yang dapat dikategorikan fitnah; (3) mendeskripsikan penggunaan bahasa dalam medsos yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan; dan (4) mendeskripsikan penggunaan bahasa dalam medsos tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pernyataan netral.

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada para pengguna medsos pada umumnya. Komunikasi seperti apa yang sebaiknya dilakukan dan komunikasi seperti apa yang sebaiknya dihindari. Dengan begitu, kesalahpahaman dapat dihindari. Lebih jauh lagi penelitian dapat memberikan kontribusi tentang komunikasi seperti yang dapat dikenai sanksi hukum dan sebaliknya komunikasi seperti apa yang tidak dapat dikenai sanksi hukum.

## **LANDASAN TEORI**

Penelitian linguistik forensik di Indonesia masih jarang dilakukan. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sudah mengawali penelitian linguistik forensik dengan menyusun pedoman yang berjudul *Pedoman Penelitian Linguistik Forensik*. Sesuai dengan judulnya buku itu merupakan pegangan bagi para peneliti linguistik forensik. Waljinah (2017) mengadakan penelitian tentang peran implikatur dalam interogasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran implikatur menjadi tiga macam, yaitu implikatur sebagai strategi untuk mengungkap pengakuan, implikatur sebagai interogasi yang berkarakter humanis, dan implikatur dapat dipakai sebagai interogator tanpa tekanan atau paksaan. Sementara itu, Muhassin (2014) mengadakan penelitian tentang mikrolinguistik dan makrolinguistik. Dalam penelitian itu disimpulkan bahwa penelitian linguistik terbuka untuk disiplin ilmu lain. Salah satunya adalah linguistik forensik. Penelitian ini merupakan penelitian linguistik forensik dengan objek penelitian penggunaan bahasa di media sosial (medsos).

Medsos sudah lama amat populer di masyarakat. Pengertian tentang medsos bermacam-macam. Saputra (2011) menyatakan bahwa media sosial merupakan sebuah wadah yang dimanfaatkan manusia untuk melakukan sebuah interaksi sosial satu sama lainnya secara *online* dengan menggunakan jaringan internet. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein dalam <https://ptkomunikasi.wordpress.com> (2012)



menyatakan bahwa media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.” Sementara itu, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima (2017)* dinyatakan bahwa medsos adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah media komunikasi antarpengguna dengan memakai laman dalam internet.

Media sosial (medsos) dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Dalam hubungan ini, Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2012) membagi medsos menjadi (1) jejaring sosial atau *social networks*, (2) media diskusi (*discuss media*), (3) *publish*, (4) *social game*, (5) *share media*. Selain itu, ada kategori media sosial lainnya seperti *virtual worlds*, *livestream*, *MMO*, *livecast*, dan *microblog*. Adapun ciri medsos dinyatakan Andreas Kaplan dan Michael Haenlein sebagai berikut.

1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang, tetapi untuk banyak orang.
2. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *gatekeeper*.
3. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat jika dibanding dengan media lainnya.
4. Penerima pesanlah yang menentukan waktu interaksi.

Penelitian tentang penggunaan bahasa di medsos dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik pendekatan linguistik murni maupun pendekatan nonlinguistik atau pendekatan multidisipliner. Pendekatan secara linguistik murni dapat dilakukan, misalnya, secara fonologi, morfologi, atau sintaksis. Adapun pendekatan nonlinguistik atau multidisipliner, antara lain, pendekatan penggunaan bahasa dari kacamata sosiologi atau yang biasa disebut sosiolinguistik, pendekatan penggunaan bahasa dari kacamata antropologi atau biasa dikenal dengan istilah antropinguistik, atau pendekatan penggunaan bahasa dari kacamata forensik atau linguistik forensik.

Linguistik forensik merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu ilmu linguistik dan ilmu forensik. Linguistik berarti ‘ilmu bahasa’. Subyantoro (2017: 2) menyatakan, “Istilah *forensik* secara etimologi berasal dari *forens(is)* dalam bahasa Latin yang berarti berkaitan dengan forum atau publik’. Adapun Khatimah (2016: 7) menyatakan, “Linguistik forensik didefinisikan sebagai penerapan ilmu linguistik dalam suatu ranah sosial khusus, yakni ranah hukum. Selanjutnya, Subyantoro (2017) menyatakan bahwa linguistik forensik adalah kajian bahasa yang difokuskan pada semua permasalahan bahasa dalam bidang hukum. Selanjutnya Muhassin (2014) menyatakan bahwa linguistik forensik adalah salah satu dari banyak cabang ilmu linguistik. Linguistik forensik masuk dalam kategori linguistik interdisipliner. Maksudnya, linguistik forensik adalah wujud dari persinggungan antara linguistik dan bidang atau ranah legal dan hukum dan peradilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kajian linguistik forensik adalah kajian bahasa yang terkait dengan masalah hukum.

Linguistik sebagai ilmu memiliki banyak cabang. Dalam hubungan ini, Verhaar (210: 9—16) membagi cabang linguistik berdasarkan ilmu yang mendasari linguistik menjadi bermacam-macam, antara lain (1) fonologi, (2) morfologi, (3) sintaksis, dan (4) semantik. Dalam penelitian ini hanya dipilih salah satu cabang



linguistik, yaitu semantik sebagai kajian dalam penelitian ini. Hal itu dipilih karena analisis data yang terkait dengan pasal penghinaan adalah analisis makna.

Objek linguistik forensik cukup luas. Coulthard dan Johnson dalam Khatimah (2016: 8) membagi objek linguistik forensik menjadi (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) wawancara (*interview*) dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur. Dari sisi linguistik, Subyantoro (2017: 8—10) membagi bidang linguistik menjadi, antara lain, forensik akustik, analisis wacana, dan analisis semantik. Data penelitian ini adalah data penggunaan dalam medsos (Twitter). Tinjauan linguistik forensik dalam penelitian ini menentukan objek penelitian sebagai bukti linguistik dalam persidangan. Data itu dianalisis secara semantik.

Menurut Djajasudarma (1993: 1), istilah *semantik* yang dalam bahasa Inggris *semantics* berasal dari bahasa Yunani *sema* yang berarti ‘tanda’. Semantik digunakan untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Pateda (2010: 7) menyatakan bahwa semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna. Sejalan dengan itu, Verhaar (2010: 385) menyatakan bahwa semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna. Selanjutnya, Chaer (2006: 115) menyatakan, “Studi semantik lazim diartikan sebagai bidang dalam linguistik yang meneliti atau membicarakan atau mengambil makna bahasa sebagai objek kajiannya.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semantik merupakan bagian dari linguistik yang mempelajari makna bahasa.

Dalam linguistik atau ilmu makna bahasa dibedakan menjadi banyak jenis. Chaer (20017: 117—128) membagi makna menjadi lebih sederhana daripada pembagian Pateda (2010: 96—132) dan Djajasudarma (1993: 7—16), yaitu menjadi lima jenis sebagai berikut: (1) makna leksikal, (2) makna gramatikal, (3) makna kontekstual, (4) makna idiomatikal, dan (5) makna konotasi. Dalam penelitian ini dipilih pembagian yang sederhana, yaitu lima jenis makna sebagaimana dikemukakan oleh Chaer. Kelima jenis makna itu juga sering digunakan dalam memahami data yang merupakan barang bukti di persidangan. Selain itu, semua substansi jenis yang dikemukakan oleh Chaer itu ada dalam pembagian Pateda dan Djajasudarma. Selanjutnya, Chaer (Chaer, 2017: 119) menjelaskan bahwa makna leksikal sama dengan makna denotatif atau makna referensial. Artinya, makna kata apa adanya, tidak terkait dengan konteks. Sebaliknya, makna kata dalam kaitannya dengan tata bahasa disebut makna gramatikal yang meliputi afiksasi, reduplikasi, komposisi atau fraseologi, dan pengalimatan. Namun, sering terjadi makna kata baru menjadi jelas setelah dimaknai secara konteks. Pemaknaan seperti itu disebut pemaknaan kontekstual. Menurut Saputra (2011: 235—256), sesungguhnya pemaknaan bahasa baru jelas apabila jelas pula konteksnya. Pemaknaan dapat juga dipahami secara khusus yang dikaitkan dengan kata lain, tetapi makna setiap unsurnya sudah tidak ada. Pemaknaan seperti itu disebut pemaknaan idiomatikal. Yang terakhir makna konotasi. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan makna konotasi adalah makna yang di dalamnya ada rasa senang (*favoureble*) atau rasa tidak senang (*favoureble*). Menurut Chaer (2017: 152), konotasi berkaitan dengan nilai rasa positif, nilai rasa negatif, atau nilai rasa yang netral. Jadi, pengertian makna konotasi bukan merupakan pertentangan dari makna denotasi yang disamakan dengan makna yang



sebenarnya dan bukan makna yang sebenarnya. Tidak tepat jika dikatakan bahwa makna konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya.

Pemahaman barang bukti di persidangan yang terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik digunakan linguistik forensik, yaitu penggabungan ilmu bahasa (linguistik) dan ilmu hukum. Dasar-dasar pemahaman secara linguistik telah diuraikan di atas. Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* dan *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Dalam *KUHP* yang digunakan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada bab tentang penghinaan. Menurut Sugandhi (1980: 331), penghinaan berarti ‘penyerangan kehormatan orang lain’. Selanjutnya, dijelaskan bahwa penghinaan dapat dibedakan menjadi enam macam, yaitu (1) menista atau mencemarkan nama baik, (2) menghina dengan tulisan, (3) memfitnah, (4) penghinaan ringan, (5) mengadu secara memfitnah, dan (6) menuduh secara memfitnah. Selanjutnya, *UU ITE* dipilih Pasal 27 ayat (3). Hal itu dilakukan dengan alasan sebagai berikut. *Pertama*, akhir-akhir ini medsos diwarnai dengan penggunaan bahasa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan (1) penghinaan/penistaan atau pencemaran nama baik, (2) fitnah, dan (3) penghinaan ringan. *Kedua*, ketiga hal itulah yang banyak dilaporkan kepada kepolisian selama beberapa tahun terakhir. *Ketiga*, penggunaan bahasa dalam medsos lebih banyak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketiga hal di atas.

Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam menganalisis data penggunaan bahasa di medsos, yaitu (1) pemahaman tentang bahasa yang digunakan dalam medsos atau pemahaman secara linguistik dan (2) pemahaman secara hukum. Pemahaman secara linguistik dilakukan untuk memastikan apakah tulisan itu mengandung unsur-unsur yang melanggar undang-undang atau tidak. Tulisan itu dikaji kata demi kata secara cermat agar pemahamannya tidak salah. Pemahaman hukum dilakukan agar pengategorian sebuah tulisan dapat dilakukan secara tepat. Hal itu berarti bahwa dalam mengategorikan sebuah tulisan yang melanggar hukum atau tidak perlu pemahaman secara cermat terhadap (1) tulisan itu sendiri dan (2) pemahaman secara hukum yang terkait dengan pasal yang disangkakan.

Selain pengertian secara linguistik di atas, pemahaman secara hukum juga sangat penting agar tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum. Namun, dalam Pasal 27 *UU ITE* tidak terdapat penjelasan tentang *penghinaan* atau *pencemaran nama baik*. Pada bagian penjelasannya hanya ditulis “Cukup jelas.” Hal itu berarti bahwa penjelasan tentang *penghinaan* atau *pencemaran nama baik* harus dicarikan dalam undang-undang lain. Ngani (2012: 46—48) menyatakan bahwa konsep dasar hukum dibagi menjadi (1) semantik hukum, (2) kaidah hukum, (3) sistematik hukum, (4) konstruksi hukum, (5) fiksi hukum, (6) pembentukan hukum, dan (7) penafsiran hukum. Dalam hubungan dengan pemahaman hukum dalam penelitian ini, dasar yang ketiga, yaitu *sistematik hukum*, merupakan konsep dasar yang penting. Dijelaskan selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan konsep *sistematik hukum* adalah sistem pemahaman secara menyeluruh. Artinya, berbagai ketentuan hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan. Ketentuan satu dengan ketentuan yang lain saling berkaitan atau saling berhubungan.

Hilman (2010: 21—26) membagi penafsiran hukum menjadi (1) penafsiran menurut tata bahasa, (2) penafsiran menurut sistem, (3) penafsiran menurut sejarah, (4) penafsiran menurut sosiologi, dan (5) penafsiran secara autentik. Di antara lima hal itu, yang sejalan dengan penelitian ini dan sejalan pula dengan *sistematik hukum*



adalah *penafsiran menurut sistem*. Hilman (2012: 22) mendefinisikan, “Sistem artinya suatu kesatuan atau kebulatan pengertian dari unsur-unsur yang saling bertautan antara yang satu dan yang lain.” Dalam hubungan ini, dapat dicontohkan pemahaman Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam UU ITE tidak dijelaskan pengertian tentang *informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*. Pengertian *informasi elektronik* dijelaskan dalam undang-undang itu. Namun, pengertian tentang *muatan penghinaan dan pencemaran nama baik* tidak ditemukan dalam penjelasan pasalnya. Di dalam penjelasannya hanya ditulis “Cukup jelas” sebagaimana penjelasan di atas. Penjelasan tentang *muatan penghinaan dan pencemaran nama baik* harus dicari dalam undang-undang yang lain yang substansinya sama dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas. Dalam KUHP bab tentang penghinaan terdapat penjelasan tentang *muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*. Dalam undang-undang itu dijelaskan tentang *muatan penghinaan dan pencemaran nama baik* sebagaimana telah dijelaskan di atas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian ini fokus pada penelitian makna (*meanings*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan fokus penelitian makna adalah bahwa penelitian ini akan memaknai data demi data untuk dapat menemukan hasil penelitian. Setiap data diteliti fenomena yang ada di dalamnya untuk kemudian dijadikan ciri fenomena umum sebagai hasilnya. Metodologi penelitian kualitatif ini akan menghasilkan penelitian deskriptif.

Menurut Sugiyono (2011: 9), dinyatakan bahwa secara garis besar metode penelitian dapat dibedakan menjadi (1) metode penelitian kuantitatif, (2) metode penelitian kualitatif, dan (3) metode penelitian kombinasi. Selanjutnya, pembagian jenis metode penelitian dijelaskan secara detail sebagai berikut. Metode penelitian kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu metode survei dan metode eksperimen. Adapun metode penelitian kualitatif dibagi menjadi lima jenis, yaitu (1) riset fenomenologis (*research phenomenological*), (2) teori membumi (*grounded theory*), (3) etnografi (*ethnography*), (4) studi kasus (*case study*), dan (5) naratif (*narrative*). Kemudian, metode penelitian kombinasi dibedakan menjadi dua, yaitu (1) metode berurutan (*sequential*) dan (2) metode campuran (*concurrent*). Masing-masing dibedakan menjadi dua. Metode berurutan (*sequential*) dibedakan menjadi dua, yaitu (1) urutan pembuktian (*sequential explanatory*) dan (2) urutan penemuan (*sequential exploratory*). Metode campuran (*concurrent*) dibedakan menjadi dua pula, yaitu (1) metode campuran berimbang antara kuantitatif dan kualitatif (*concurrent triangulation*) dan (2) metode campuran tidak berimbang antara kuantitatif dan kualitatif (*concurrent embedded*).

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah karakteristik yang sesuai dengan penelitian yang datanya diambil dari medsos. Sugiyono (2011: 15–16) menyatakan bahwa karakteristik penelitian kualitatif meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) dilakukan secara alamiah; (2) lebih bersifat deskriptif; (3) lebih menekankan proses daripada produk (*outcome*); (4) melakukan analisis data secara induktif; dan (5) lebih menekankan makna.

Di atas telah dijelaskan bahwa penelitian kualitatif dibedakan menjadi bermacam-macam, yaitu (1) riset fenomenologis (*research phenomenological*), (2) teori membumi (*grounded theory*), (3) etnografi (*ethnography*), (4) studi kasus (*case study*), dan (5) naratif (*narrative*). Dari kelima jenis penelitian itu, yang





dipilih adalah studi kasus (*case study*). Dalam penelitian jenis ini peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap data untuk dapat memperoleh makna di balik data itu.

Dalam penelitian kualitatif, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi. Sugiyono (2015: 382) menyatakan bahwa teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang datanya diperoleh langsung di lapangan. Hal itu dilakukan karena data dalam penelitian kualitatif ini merupakan data verbal (tulisan) dalam medsos. Berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif. Menurut Nasution (2014: 106), penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik. “Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Sejalan dengan itu, Sugiyono (2015: 196) juga menyatakan bahwa teknik pengumpulan observasi digunakan penelitian berkenaan dengan perilaku manusia. Selanjutnya, Jogiyanto (2004: 90) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) observasi perilaku atau *behavioral observation* dan (2) observasi nonperilaku atau *nonbehavioral observation*. Teknik observasi yang sesuai dengan penelitian ini adalah teknik observasi perilaku.

Lebih lanjut Jogiyanto (2004: 90—91) membagi observasi perilaku menjadi empat, (1) analisis nonverbal (*nonverbal analysis*), (2) analisis linguistik (*linguistic analysis*), (3) analisis linguistik ekstra (*extralinguistic analysis*), dan (4) analisis spasial (*spatial analysis*). Analisis nonverbal merupakan analisis yang bertitik tolak pada bahasa tubuh atau gerak tubuh. Sebaliknya, analisis linguistik adalah analisis yang bertitik tolak pada bahasa yang digunakan oleh manusia. Analisis bahasa verbal yang dilakukan secara lebih mendalam atau secara lebih detail disebut analisis linguistik ekstra. Selanjutnya, analisis spasial adalah analisis hubungan antarorang secara fisik.

Dari uraian di atas dapat ditentukan bahwa teknik pendekatan yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi perilaku dengan teknik analisis linguistik. Data dalam penelitian ini merupakan data lapangan yang berupa penggunaan bahasa oleh masyarakat dalam medsos. Kata-kata atau kalimat-kalimat yang digunakan dalam medsos itu sebenarnya merupakan cerminan sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungannya. Stimulan yang sama dapat disikapi secara berbeda-beda. Ada orang yang menyikapi stimulan itu dengan biasa-biasa saja; ada juga yang menyikapinya secara tidak santun atau kasar; bahkan, ada juga yang sangat tidak santun atau sangat kasar.

## **PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pembahasan ini perlu ditentukan landasan hukum yang digunakan untuk mengategorikan suatu tulisan termasuk tulisan yang dapat dikenai pidana atau tidak. Landasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bab XVI yang berjudul “Penghinaan”. Bab ini terdiri atas sebelas pasal, yaitu Pasal 310—Pasal 320. Landasan hukum yang lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27, ayat (3). Kedua bagian dalam undang-undang itu mengatur hal yang sama, yaitu mengatur pelanggaran penghinaan atau pencemaran nama baik.



Penentuan landasan hukum itu berdasarkan pada kenyataan bahwa kasus-kasus yang marak akhir-akhir ini adalah kasus yang tergolong penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal itu terjadi, antara lain, karena (1) hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia dan (2) penggunaan medsos yang juga sangat marak. Ujaran-ujaran negatif pada umumnya muncul sebagai reaksi atas kejadian yang ada. Hal itu terbukti bahwa pada saat sedang terjadi pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jakarta, sangat mudah orang dapat menemukan ujaran-ujaran negatif dari berbagai pihak. Publik seakan-akan terbelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kedua kelompok seakan-akan saling berhadapan. Kedua belah pihak saling menghujat. Di situlah ujaran yang negatif sangat mudah ditemukan. Namun, setelah pilkada usai, tulisan yang saling menghujat itu secara perlahan-lahan mulai berkurang. Secara spontan jika ada hal yang dianggap kontroversial, muncul lagi kelompok-kelompok yang saling menghujat kemudian menghilang. Begitu seterusnya.

Data yang diperoleh dari medsos itu dianalisis dengan menggunakan ilmu semantik dan ilmu hukum. Landasan hukum yang digunakan adalah KUHP, khususnya Bab XVI, dan UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3). Dalam Pasal 27 ayat (3), UU ITE tidak terdapat penjelasan. Di atas telah dijelaskan bahwa penafsiran hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pemahaman *sistematik hukum*. Artinya, pemahaman sebuah undang-undang harus juga memahami undang-undang lain yang terkait. Berdasarkan teori itu, dalam memahami Pasal 27 ayat (3), UU ITE, harus dipahami juga penjelasan Bab XVI KUHP. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab IV. Sugandhi (1980: 331) membagi bab penghinaan dalam KUHP itu menjadi enam macam seperti berikut: (1) menista/Pasal 310 ayat, (2) menista atau mencemar dengan tulisan/Pasal 310 ayat (2), (3) memfitnah/Pasal 311, (4) penghinaan ringan/Pasal 315, (5) mengadu secara memfitnah/Pasal 317, dan (6) menuduh secara memfitnah/Pasal 318.

Penghinaan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menista (Pasal 310 ayat [1]) adalah penghinaan secara lisan. Jika penghinaan itu dilakukan secara tertulis, pelaku dapat dikenai Pasal 310 ayat (2). Pasal 311 mensyaratkan adanya pembuktian. Jika tuduhan yang disampaikan dapat dibuktikan kebenarannya, penuduh tidak dapat dikenai sanksi. Sebaliknya, jika tuduhan itu tidak dapat dibuktikan, penuduh dapat dikenai sanksi. Pasal 315 merupakan pasal penghinaan ringan. Pasal ini tidak mensyaratkan adanya tuduhan kepada seseorang sebagaimana pada Pasal 310 dan 311. Pasal ini hanya mensyaratkan adanya kata-kata yang secara umum termasuk kata yang keji. Pasal 317 merupakan pasal tuduhan secara tidak langsung. Yang dapat dikenai pasal ini adalah orang yang membuat laporan palsu atau menyuruh membuat laporan palsu kepada pejabat. Pasal 318 dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain yang tidak bersalah terlihat seperti bersalah. Misalnya, seseorang menaruh narkoba di mobil orang lain secara sembunyi-sembunyi. Akibat perbuatan itu, pemilik mobil yang dituduh menyimpan barang terlarang kemudian ditangkap polisi. Masyarakat mengenalnya sebagai jebakan. Orang yang menjebak itu dapat dikenai Pasal 318 ini.

Data lain yang ditemukan adalah data yang tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Ternyata di tengah-tengah para pengguna medsos yang cenderung saling menghujat terdapat pengguna medsos yang tetap memperhatikan sopan santun dalam berkomunikasi. Orang-orang yang tergolong kelompok ini membuat



komentar dengan kepala dingin sehingga bahasa yang digunakan tidak dapat dikenai pasal-pasal dalam KUHP, terutama pasal-pasal tentang penghinaan.

Dari keenam jenis penghinaan itu tidak semua dibahas dalam penelitian ini. Data penelitian yang terkumpul tidak terkait dengan Pasal 310 ayat (1) karena yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menista adalah bahasa lisan, bukan tulisan. Pasal 317 tentang fitnah tidak secara langsung juga tidak dibahas dalam penelitian ini karena tuduhan yang dimaksud dalam Pasal 317 ini adalah tuduhan secara tidak langsung. Sementara itu, data yang dijadikan objek penelitian ini merupakan data yang mengandung tuduhan secara langsung. Pasal 318 juga tidak dibahas dalam penelitian ini karena pasal ini dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain dituduh bersalah. Jadi, yang menjadi objek atau sasaran Pasal 318 adalah perbuatan seseorang, bukan bahasa yang digunakan. Dengan demikian, hanya tiga jenis penghinaan yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga jenis penghinaan itu adalah (1) menista dengan tulisan, (2) memfitnah, dan (3) menghina ringan. Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu data yang tidak tergolong sebagai penghinaan.

Suatu tulisan dapat dikategorikan sebagai tulisan yang menista apabila memenuhi syarat sebagai berikut: (1) mengandung tuduhan; (2) menjelekkkan orang lain; (3) arah tuduhannya jelas; (4) sengaja disebarkan kepada berbagai pihak; dan (5) tuduhan bersumber dari yang bersangkutan, bukan kata orang. Berdasarkan kriteria itu, data penelitian yang dapat dikategorikan sebagai tulisan yang tergolong penghinaan dibahas di bawah ini satu per satu.

### 1.1 Penghinaan dengan Tulisan

Ada seorang artis yang berinisial UU membuat pernyataan di akun Twitternya yang oleh sebagian masyarakat dinilai sebagai penghinaan terhadap seorang tokoh agama tertentu. Para netizen heboh menanggapi cuitan artis itu. Salah satunya berbunyi seperti di bawah ini.

- 1) “Ulama yg mana yg ente maksud...si rizieq itu bukan ulama tp dajall“ (23 Januari 2017).

Secara denotasi Dajal berarti ‘setan yang datang ke dunia apabila kiamat sudah dekat (berupa raksasa)’. Secara konotasi Dajal berarti ‘orang yang buruk kelakuannya atau penipu atau pembohong’ (KBBI, 2017: 287). Menyebut seseorang sebagai Dajal dapat dikenai Pasal 310, KUHP, dengan tuntutan hukuman selama-lamanya empat tahun empat bulan. Menyebut seseorang sebagai Dajal juga dapat dikenai Pasal 27 ayat, (3) UU ITE, dengan ancaman hukuman lebih berat, yaitu hukuman selama-lamanya empat tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar). UU ITE dapat dikenakan kepada orang yang membuat pernyataan di atas karena pernyataan itu terdapat dalam medsos yang merupakan media elektronik. Lain halnya jika pernyataan itu ditulis di media massa cetak atau ditulis di tempat-tempat umum.

Apakah benar pernyataan yang menyebut seseorang dengan Dajal itu tergolong pernyataan yang menista? Kata *menista* berasal dari kata dasar *nista*. Kata *nista* berarti ‘hina atau rendah’. Kata *menista* berarti ‘mencela atau menganggap nista atau menganggap hina’ (KBBI, 2017: 1149). Kata *menista* bersinonim dengan *menghina*. Kata *menghina* berarti ‘merendahkan, memburukkan, atau menyinggung perasaan orang lain’ (KBBI, 2017: 579). *Menghina orang lain* berarti ‘merendahkan atau menyinggung orang lain’. Kata *mencemarkan* berarti (1)



‘menjadikan cemar atau mengotorikan’ dan (2) ‘memburukkan atau merusakkan nama baik orang’. Kata *pencemaran* berarti ‘perbuatan mencemarkan’ (KBBI, 2017: 305—306).

Jika dicermati, pernyataan yang berbunyi, “Ulama yg mana yg ente maksud...si rizieq itu bukan ulama tp dajall .... “ memenuhi syarat sebagai pernyataan yang dapat dikenai Pasal 310 KUHP atau Pasal 27 ayat (3), UU ITE. Perjelasannya adalah seperti berikut.

- (a) Dalam pernyataan tersebut terdapat tuduhan, yaitu tuduhan sebagai Dajal.
  - (b) Pernyataan itu menjelekkan orang lain karena seseorang dikatakan sebagai Dajal atau orang yang buruk kelakuannya atau penipu atau pembohong.
  - (c) Sasaran tuduhannya disebut dengan jelas dalam pernyataan itu.
  - (d) Tuduhan itu disebarkan kepada masyarakat luas (pengguna medsos). Pembuat pernyataan pasti tahu bahwa pernyataannya dapat diakses atau dibaca oleh banyak orang.
  - (e) Pembuat pernyataan itu adalah pemilik akun yang bersangkutan. Pernyataan dibuat oleh pemilik akun tersebut, bukan orang lain. Berbeda halnya dengan, misalnya, apabila dalam pernyataan itu pembuat akun menggunakan frasa “menurut si fulan”. Jika frasa itu ada, yang membuat tuduhan adalah si fulan, bukan pembuat akun. Namun, perlu dicatat bahwa orang yang meneruskan, bukan pembuat, informasi elektronik yang mengandung penghinaan juga dapat dikenai Pasal 27 ayat (3) dengan tuntutan hukum yang sama dengan yang membuat informasi tersebut.
- 2) “Aku mengikuti ulama yg bisa menjadi panutan, bukan ulama gadungan seperti rizieq (23 Januari 2017)”.

Kata *gadungan* berarti ‘palsu atau bukan yang sebenarnya atau jadi-jadian’ (KBBI, 2017: 491). Frasa *ulama gadungan* berarti ‘ulama palsu atau bukan ulama yang sebenarnya’. Untuk dapat dikenai Pasal 310 KUHP, tuduhan itu tidak perlu dibuktikan apakah tuduhan ulama palsu itu benar atau tidak. Pernyataan pendek itu mengandung tuduhan. Tuduhan itu jelas dapat memburukkan nama yang dituduh itu. Yang dituduh juga jelas. Namanya disebut dalam pernyataan itu. Tuduhan itu juga tersebar luas karena diunggah dalam medsos. Yang menuduh juga dapat diketahui dengan pasti jika diusut. Berdasarkan tulisannya, pernyataan itu memang dibuat oleh pemilik akun, bukan tulisan atau pernyataan orang lain.

Penentuan nama yang dituduh harus dipahami secara konteksnya. Hal itu penting karena nama yang sama pada kenyataannya sering terjadi. Tulisan namanya sama, tetapi orangnya berbeda. Semua data medsos dalam penelitian ini merupakan dialog yang ditulis. Pengguna saling merespons kemudian terjadi saling menanggapi antarpengguna medsos. Dengan demikian, penentuan nama yang dituduh dapat dilakukan dengan memahami pernyataan tersebut berdasarkan konteksnya.

## 1.2 Memfitnah

Kata *fitnah* berarti ‘perkataan bohong atau tidak berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain’ (KBBI, 2017: 467). *Memfitnah* berarti ‘menjelekkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan, dsb.)’. Ada empat hal yang terkandung dalam makna kata fitnah di atas. *Pertama*, yang tergolong sebagai fitnah adalah perkataan bohong atau tidak sesuai dengan



kenyataan. *Kedua*, perkataan tersebut disebarkan kepada pihak-pihak lain. *Ketiga*, perkataan bohong tersebut secara nyata ditujukan kepada seseorang. *Keempat*, perkataan tersebut harus bersumber dari yang bersangkutan, bukan bersumber dari orang lain. Suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai fitnah apabila memenuhi syarat-syarat berikut: (1) mengandung tuduhan; (2) menjelekkan orang lain; (3) arah tuduhannya jelas; (4) tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; (5) sengaja disebarkan kepada berbagai pihak, dan (6) bersumber dari yang bersangkutan.

Pada dasarnya *pencemaran nama baik* dan *fitnah* mengandung substansi yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada perlu pembuktian atau tidak. *Pencemaran nama baik* tidak harus ada pembuktian, sedangkan *fitnah* harus pembuktian. Namun, yang berwenang membuktikan bukan ahli bahasa. Yang berwenang membuktikan suatu tuduhan benar atau tidaknya adalah aparat penegak hukum. Contohnya sebagai berikut.

1) "Hakim cepi di sogok, nanti hakim nya di promosikan, seperti hakim dwiarso yang menjatuhkan hukuman ke ahok (30 September 2017).

Data di atas diperoleh pascaputusan praperadilan terkait dengan dakwaan korupsi KTP elektronik yang biasa disebut E-KTP. Tanggapan para pemakai medsos sangat marak. Seperti biaya tanggapan yang muncul beragam. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Namun, ada pula yang netral atau tidak berpihak. Salah satu pengguna akun Twitter menulis pernyataan di akunnya seperti di atas.

Bagian kalimat yang berbunyi "Hakim cepi di sogok" termasuk tuduhan. Dalam pernyataan itu terdapat kata *disogok*. Kata *disogok* merupakan bentuk pasif dari *menyogok*. Kata dasarnya *sogok* yang berarti 'sesuatu yang digunakan untuk menyogok'. Secara konotasi kata *menyogok* berarti 'menyuap atau memberi suap' (KBBI, 2017: 1581). Selanjutnya, kata *disogok* berarti 'diberi sogok atau diberi suap'. Dalam bagian pernyataan yang berbunyi, "Hakim cepi di sogok" pembuat akun menuduh bahwa nama hakim yang disebut dalam pernyataan itu telah diberi suap.

Enam syarat tentang pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai fitnah terpenuhi, kecuali satu kriteria, yaitu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Persoalan ini menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Adanya tuduhan merupakan syarat yang pertama dan syarat ini terpenuhi. Syarat kedua, yaitu menjelekkan orang lain, juga terpenuhi karena seorang hakim yang disebut atau dikatakan menerima suap jelas menjelekkan hakim yang dituduh itu. Tuduhan itu dapat merendahkan atau menjelekkan nama baiknya. Arah tuduhannya jelas karena nama yang dituduh disebut secara jelas dalam pernyataan tersebut. Tuduhan itu tersiar secara luas karena dapat dibaca atau diakses oleh banyak orang. Tuduhan itu bersumber dari yang bersangkutan atau yang membuat akun tersebut. Hal itu dapat diketahui dari bunyi tulisannya.

2) "Ahok itu korupsinya banyak woi!! Sumber waras, taman bmw, bus transjkt, dulu jokowi dan ahok wktu msih gub.bilang warga bukit duri akan digeser, ehh th 2016 malah digurur, pdhal janjinya digeser!!!jujur ya?! (May 3, 2017 7:19am)

Kalimat yang berbunyi, "Ahok itu korupsinya banyak woi!!" itu terdapat tuduhan, yaitu orang yang namanya disebut dalam kalimat itu melakukan korupsi yang banyak. Kalimat berikutnya merupakan contoh korupsi yang dilakukan oleh orang yang namanya disebutkan dalam kalimat tersebut. Ada tiga tindak korupsi



yang dilakukan oleh nama yang disebut dalam pernyataan itu, yaitu Sumber Waras (rumah sakit), Taman BMW, dan Bus Transjakarta. Pembuat akun menuduh nama yang disebut dalam pernyataan itu melakukan korupsi di tiga objek tersebut. Tuduhan lain adalah bahwa nama yang disebut itu mengingkari janji. Janjinya hanya menggeser warga, tetapi kenyataannya menggusur.

Pernyataan di atas mengandung tuduhan yang dapat dikategorikan sebagai fitnah apabila apa yang dituduhkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Syarat adanya tuduhan sudah terpenuhi. Arah tuduhannya jelas, yaitu nama yang disebut dalam pernyataan tersebut. Syarat berikutnya tuduhan itu tersiar juga sudah terpenuhi karena pernyataan tersebut diunggah dalam medsos. Akun itu dapat diakses oleh banyak orang. Tuduhan dibuat oleh pemilik akun, bukan dari orang lain. Hal itu dapat dilihat dari tulisannya yang tidak menggunakan, misalnya, menurut X atau kata X.

### 1.3 Penghinaan Ringan

Di atas telah dijelaskan bahwa suatu tulisan dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan apabila di dalamnya ada kata-kata yang oleh masyarakat umum dinilai sebagai kata-kata yang keji atau hina. Nama-nama hewan, seperti *anjing*, *babi*, *kerbau*, dan *monyet* atau *bajingan* serta kata kasar, seperti *lonte*, *pelacur*, atau *pencuri* dapat tergolong makian atau cacian jika dialamatkan kepada orang tertentu. Dalam tulisan kategori ini tidak harus ada tuduhan seperti dalam jenis penghinaan lain. Pasal 317 atau Pasal 27 ayat (3), UU ITE, tidak mensyaratkan adanya tuduhan. Di bawah ini dibahas data-data yang tergolong penghinaan ringan.

- 1) (1) “Namanya juga lonte. (2) Jangankan 3 akun di twitter dia bisa bikin sampe 1000 akun. (3) akun pertama utk kehidupan normal dia, akun kedua untuk kehidupan nge-lonte dia, akun ke-3 utk selingkuhan, akun ke-4 utk langganan esek anggota dewan dan seterusnya (4 Oktober 2017 0:07).

Pada bagian pertama terdapat kata *lonte*. Julukan itu dialamatkan kepada seorang artis yang apabila ditelusuri dapat diketahui namanya. Kata *lonte* berarti ‘perempuan jalang, wanita tunasusila, pelacur, sundal, jobang, cabo, atau munci’ (KBBI, 2017: 1005). Di antara beberapa sinonimnya itu yang lebih populer adalah perempuan jalang, wanita tunasusila, dan pelacur. Memberikan julukan *lonte* kepada seseorang sudah tentu dapat menjelekkkan nama orang lain. Bagian kedua berbunyi, “Jangankan 3 akun di twitter dia bisa bikin sampe 1000 akun.” Pernyataan itu berisi pendapat pembuat akun bahwa bagi artis yang dimaksud membuat akun berapa pun tidak masalah. Di dalamnya tidak terdapat kata-kata yang tergolong umpatan atau makian.

Bagian ketiga cukup panjang. Bagian ini terdiri atas empat bagian. Bagian ini berisi jabaran dari kalimat sebelumnya, yaitu fungsi akun sang artis menurut pembuat pernyataan itu. Menurutnya, akun yang akan dibuka dapat difungsikan untuk (1) kehidupan biasa, (2) melacurkan diri sang artis, (3) perselingkuhan, dan (4) kegiatan esek-esek dengan anggota dewan. Jika dilihat dari isinya, pernyataan itu mengandung tiga unsur negatif, yaitu fungsi (2), (3), dan (4). Seturut dengan fungsi itu, di dalamnya terdapat kata-kata negatif yang ditujukan kepada sang artis. Yang pertama adalah frasa *melacurkan diri sang artis*. Pernyataan seperti itu dapat menjelekkkan nama baik seseorang. Yang kedua adalah frasa *kehidupan nge-lonte dia*. Kata *nge-lonte* bukan kata baku yang berarti ‘menjual diri atau melacurkan diri’. Melontarkan kata-kata itu juga dapat merendahkan martabat orang lain. Frasa



berikutnya adalah *langganan esek anggota dewan*. Kata *esek* (*esek*) di masyarakat dikenal sebagai istilah yang negatif. Menurut Rahim (2016), *esek-esek* adalah istilah yang maknanya berkaitan erat dengan hubungan badan, persetubuhan, atau prostitusi. Frasa *langganan esek anggota dewan* berarti 'langganan praktik prostitusi dengan anggota dewan'. Lontaran kata-kata seperti itu juga merendahkan martabat orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, pernyataan di atas dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 ayat (3) atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Alasannya sebagai berikut. *Pertama*, dalam pernyataan tersebut terdapat kata-kata yang tergolong keji atau makian. *Kedua*, kata-kata keji itu ditujukan kepada seseorang. Nama yang dituju dapat diketahui dari konteksnya. Kata-kata itu tersiar karena dapat dibaca oleh banyak orang. Nama pembuat tertera dalam akun milik pembuatnya. *Ketiga*, dari tulisannya kata-kata yang dilontarkan itu berasal dari pembuat akun, bukan dari orang lain.

2) (1) "Makanya otak lu itu jangan terlalu idiot, (2) jadi orang itu pintar dikit nape biar bisa bersaing dengan orang tionghoa, (3) tanya kenapa mereka bisa kaya kaya? (4) ah cape deh mau jelasin dngan org2 otak idiot."

Pernyataan di atas dapat dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama merupakan makian terhadap lawan dialog. Frasa *otak lu* dan *terlalu idiot* merupakan kata-kata makian yang dapat merendahkan orang lain. Bagian kedua merupakan pendapat pembuat akun terhadap orang yang dimaksudnya. Pada bagian ini tidak ada kata-kata makian atau umpatan. Begitu juga bagian ketiga. Bagian keempat terdapat kata-kata makian atau umpatan seperti pada bagian pertama. Dengan demikian, tulisan ini dapat dikategorikan ke dalam penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP atau Pasal 27 ayat (3), UU ITE.

#### 1.4 Pernyataan Netral

Data yang telah dibahas di atas terdiri atas tiga jenis, yaitu (1) data yang tergolong penghinaan secara tertulis, (2) data yang tergolong fitnah, dan (3) data yang tergolong penghinaan ringan. Di atas juga sudah dijelaskan bahwa di samping tiga jenis data itu, ada lagi satu data lagi, yaitu data yang tergolong netral. Hal itu memperlihatkan bahwa dalam medsos juga terdapat banyak orang yang teguh menjaga norma-norma kepatutan atau norma-norma kesopanan. Di bawah ini dibicarakan contoh data yang tergolong pernyataan netral.

1) (1) "Ha..ha..bingung aq kalo baca komentar mbok yaho komentar yg positif memberi ilmu buat wong deso seperti saya yg bodoh ini..(2) pakailah pikiran yg jernih adem menetralkan bukan malah saling.menvonis (3) dibalik itu semua pasti pak jk punya niat yg baik..(4) wong beliau wakil.president koq..(5) tokoh besar punya ahlak yg baik pastinya..(6) kita doakan saja smog aksi bsok berakhir damai..(7) Gitu ae koq repot (May 3, 2017)."

Pernyataan di atas cukup panjang. Untuk memudahkan pemahaman, pernyataan di atas dibagi menjadi tujuh bagian. Pada bagian pertama dengan bijak pemilik akun memberikan saran kepada berbagai pihak agar dalam memberikan komentar bersikap bijak. Bahkan, pemilik akun merendahkan dirinya dengan menyebut bahwa dirinya orang kampung dan bodoh. Bagian kedua merupakan sambungan harapan atau nasihat pemilik akun agar orang bersikap bijak ketika berkomentar di medsos. Bagian ke-3, ke-4, dan ke-5 merupakan pendapat pemilik akun tentang pejabat tinggi yang namanya disebut dalam akun itu. Pemilik akun mengajak para



pengguna medsos untuk berbaik sangka terhadap pernyataan pejabat tinggi itu. Dia berkeyakinan bahwa pernyataan pejabat tinggi itu mengandung pesan positif. Bagian ke-6 merupakan harapan pemilik akun agar kegiatan esok harinya tidak ada masalah. Pernyataan itu ditutup dengan mengutip ungkapan yang biasa dipakai almarhum Gusdur. Hal itu dilakukan agar suasana menjadi lebih cair.

Data di atas memperlihatkan bahwa dalam pernyataan yang cukup panjang itu tidak terdapat kata-kata yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, atau Pasal 315 KUHP dan Pasal 27 ayat (3), UU ITE, dalam pernyataan tersebut tidak terdapat kata-kata yang tergolong penghinaan. Padahal, pernyataan-pernyataan yang kemudian dikomentari itu penuh dengan hujatan dan makian.

2) (1) “Sebenarnya tidak ada yang salah dari pidatonya Anies jika kita membaca full text keseluruhan. (2) Tetapi kritik saya terhadap gaya pidato beliau buat lah yang seefisien mungkin dan mudah dipahami oleh orang awam dengan tidak banyak retorika. (3) Pak Anies tidak berpidato sebagai rektor tetapi sbg gubernur rakyat jakarta. (4) Saran buat bapak jadikan suara orang yang berseberangan (ahoker) sbgai pemicu untuk bekerja yang lebih amanah dan lebih adil. (5) Selamat bekerja.”

Pernyataan di atas juga cukup panjang. Pemilik akun membaginya menjadi lima kalimat. Isi atau substansi data ini agak berbeda dengan data sebelumnya. Jika pada data sebelumnya pemilik akun menasihati para pengguna akun, dalam data ini pemilik akun menyampaikan pendapatnya tentang tokoh yang namanya disebut dalam akun itu. Pemilik akun juga menyampaikan pendapat atau kritik terhadap tokoh itu.

Bagian pertama merupakan pendapat pemilik akun tentang tokoh yang namanya disebut dalam pernyataan itu. Tampaknya, pendapat itu dianut untuk menetralkan berbagai komentar miring yang muncul di medsos. Pemilik akun berpendapat bahwa jika teks pidato itu dibaca secara utuh, tidak ada masalah dengan pidato itu. Kalimat (2) dan (3) merupakan kritik terhadap tokoh yang namanya disebut dalam pernyataan itu agar dalam berpidato disesuaikan dengan pendengarnya, yaitu khalayak umum. Saran berikutnya adalah bahwa agar tokoh yang disebut namanya itu memanfaatkan orang yang berseberangan dengan tokoh itu sebagai penyemangat dalam bekerja. Pernyataan ditutup dengan kalimat penyemangat kepada tokoh tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Ternyata dalam pernyataan yang cukup panjang itu tidak terdapat kata-kata yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (2), KUHP atau Pasal 27 ayat (3), UU ITE. Di dalamnya tidak terdapat tuduhan sebagaimana persyaratan dalam pasal penghinaan.

## **PENUTUP**

Saat ini penggunaan bahasa di media sosial sangat marak. Namun, sudah beberapa waktu terakhir penggunaan bahasa di medsos memperlihatkan gejala yang dinilai oleh masyarakat kurang santun, bahkan berpotensi melanggar hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas data dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang melanggar hukum. Artinya, jika pernyataan itu diadukan ke kepolisian, sebagian besar pembuat pernyataan itu dapat dikenai pidana. Dalam penelitian ini data yang dianalisis dibatasi pada data yang dapat dikategorikan





sebagai penghinaan dan lebih khusus lagi yang terkait dengan Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP atau Pasal 27 ayat (3), UU ITE.

Untuk menganalisis dan memahami data dalam penelitian ini digunakan pendekatan linguistik forensik. Hal itu berarti bahwa kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan linguistik pada satu sisi dan pada sisi lain menggunakan pendekatan ilmu hukum. Kedua disiplin itu dipadukan untuk dapat memahami data penelitian. Secara substansi penggunaan pendekatan linguistik hanya dibatasi pendekatan secara semantik atau pendekatan memahami data dari segi maknanya.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa data dapat dikelompokkan menjadi empat kategori. Keempat kategori itu adalah sebagai berikut: (1) penistaan atau pencemaran nama baik, (2) penghinaan, (3) penghinaan ringan, dan (4) data yang tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau netral. Kategori (1)—(3) menuntut persyaratan tertentu agar dapat dikategorikan sebagai penghinaan sehingga dapat dikenai Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, atau Pasal 315 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai penistaan atau pencemaran nama baik apabila memenuhi syarat (1) adanya tuduhan, (2) menjelekkan orang lain, (3) arah tuduhan atau yang dituduh dapat diketahui dengan jelas, (4) tuduhan itu disebarkan kepada banyak orang, (5) sumber tuduhan adalah yang membuat pernyataan itu sendiri, bukan dari pihak lain. Satu hal lagi yang juga dipersyaratkan oleh Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP atau Pasal 27 ayat (3), UU ITE, adalah bahwa tuduhan itu harus ditujukan kepada perseorangan, bukan kelompok atau organisasi. Jika tuduhan itu ditujukan kepada kelompok atau organisasi, aturan hukumnya berbeda.

Suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai fitnah apabila memenuhi persyaratan pada tuduhan penistaan atau pencemaran di atas dan ditambah satu syarat lagi, yaitu adanya pembuktian. Jika dalam pembuktian itu ternyata bahwa tuduhan itu tidak sesuai dengan kenyataan, pernyataan itu tidak dapat dikategorikan sebagai fitnah. Sebaliknya, jika dalam pembuktian itu ternyata bahwa tuduhan itu sesuai dengan kenyataan, pernyataan itu dapat dikategorikan sebagai fitnah. Namun, perlu dicatat bahwa yang membuktikan tuduhan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak adalah pihak penegak hukum, bukan ahli bahasa.

Kategori yang ketiga adalah kategori data yang tergolong penghinaan ringan. Jika dua kategori sebelumnya menuntut adanya tuduhan, kategori ketiga ini tidak menuntut adanya tuduhan. Akan tetapi, dalam data kategori penghinaan ringan dipersyaratkan adanya kata-kata keji yang dinilai oleh masyarakat umum sebagai penghinaan. Kata-kata, seperti *babi*, *kerbau*, *anjing*, *goblok*, *bodoh*, atau *otak kotor*, merupakan kata-kata yang tergolong sebagai penghinaan ringan apabila digunakan untuk memaki orang lain. Sudah tentu syarat lain seperti pernyataan itu tersiar, arah atau tujuan makian itu jelas, menjelekkan orang lain, dan sumber makian itu juga jelas.

Kategori data terakhir adalah kategori data yang tidak dapat dikelompokkan sebagai penghinaan atau netral. Artinya, data itu bersifat netral atau tidak mengandung tuduhan atau kata-kata yang keji sebagai umpatan atau makian. Kebanyakan isinya berupa saran untuk para pengguna medsos. Penggunaan bahasanya mencerminkan adanya penyaringan sebelum diunggah ke medsos. Pernyataan seperti itu tidak menimbulkan masalah pada dirinya sendiri atau bagi orang lain.



Kehadiran medsos pada era modern seperti sekarang ini merupakan keniscayaan. Komunikasi antarpengguna dapat dilaksanakan sangat cepat dan sangat murah. Kapan saja komunikasi lewat medsos dapat dilakukan. Asal antarpihak dapat saling merespons komunikasi dapat dilakukan kapan pun. Jika dibandingkan dengan biaya SMS, apalagi dengan telepon, biaya medsos jauh lebih murah. Namun, penggunaan medsos dapat menimbulkan dampak negatif, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dampak negatif itu akan muncul apabila pengguna medsos tidak dapat "mengendalikan diri". Artinya, pengguna medsos tidak dapat memilah mana tulisan yang dapat diunggah dan mana yang tidak dapat diunggah. Pengguna medsos tidak dapat menyaring penggunaan bahasanya. Kata-kata yang kasar dan keras digunakan terhadap lawan komunikasinya karena terbawa emosi. Hal-hal seperti itu akan merugikan diri sendiri dan/atau orang lain. Sehubungan dengan itu, hal-hal di bawah ini perlu diperhatikan oleh para pengguna medsos.

- 1) Pilih hal-hal yang pantas diunggah dalam berkomunikasi melalui medsos.
- 2) Gunakan bahasa yang santun agar komunikasi tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain.
- 3) Hindari kata-kata yang tergolong cacian atau makian yang dapat memancing kemarahan orang lain.
- 4) Hindari kata-kata yang mengandung tuduhan atau fitnah agar terhindar dari tuntutan hukum.
- 5) Jangan mudah terpancing dengan lawan komunikasi yang mengunggah pernyataan yang tidak pantas.
- 6) Tetaplah dengan kepala dingin dalam menanggapi pernyataan yang sangat kasar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alwasilah, A. Chaedar. (2005). *Pengantar Penelitian Linguistik Terapan*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Alwi, Hasan dkk. (2017). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. (2012). *Penafsiran Hukum dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Chaer, Abdul. (2006). *Leksikologi & Leksikografi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djajasudarma, T. Fatimah. (1993). *Semantik Pemahaman Ilmu Makna*. Jilid 1 dan 2. Bandung: PT Eresco.
- Hadikusuma, Hilman. (2010). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Jogiyanto. (2004). *Metodologi Penelitian: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Khatimah, Khusnul dan Fani Kusumawardani. (2016). *Pedoman Kajian Linguistik Forensi*. Jakarta: Pusat Pengembangan Strategi Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Linguistik Id. (2017) *Sejarah dan Aplikasi Linguistik Forensik*. Diunduh dari <http://linguistikid.com/sejarah-aplikasi-linguistik-forensik/> 16 Mei 2017.



- Muhassin, Mohammad. (2014). "Telaah Linguistik Interdisipliner dalam Makrolinguistik".  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ENGEDU/article/view/516/341/14> Juni 2017.
- Nasution, S. (2014). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ngani, Nico. (2012). *Bahasa Hukum dan Perundang-undangan*. Yogyakarta: PT Pustaka.
- Yustisia. Pateda, Mansoer. (2010). *Semantik Leksikal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ptkomunikasi. (2012). "Pengertian Media Sosial, Peran, serta Fungsinya".  
<https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/8> Agustus 2017.
- Rahim, Fitra. (2016). "Pengertian Esek-Esek Secara Lengkap dan Jelas".  
<http://www.homefage.ga/2016/04/pengertian-esek-esek-secara-lengkap-dan.html/12> Agustus 2017
- Rahyono, F.X. (2011). *Studi Makna*. Jakarta: Penaku.
- Saputra, Hendarto. (2011). "Penelitian Linguistik: Studi tentang Kategori Makna dalam Bahasa Indonesia". Dalam Thohir, Mudjahirin (Ed.). 2011. Refleksi Pengalaman Penelitian Lapangan Semarang: Fasindo, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Diponegoro.
- Subyantoro. (2017). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Semarang: Farishma Indonesia.
- Sugandhi, R. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelarasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso, Siswanto. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Santosa, Teguh. (2008). *Linguistik Forensik*. Dalam Sugono (ed.). Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik. 2008. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- <https://www.google.co.id>. (2015). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diunduh 15 Januari 2015.
- Verhaar, J.W.M. (2010). *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Waljinah, Sri. (2017). "Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Implikatur Percakapan dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum".  
<https://jurnal.uns.ac.id/prosidingprasasti/article/viewFile/1666/1548/12> Juni 2017.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 1 Kelompok 7**

Pembicara	: Sriyanto
Judul Makalah	: “Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial Suatu Tinjauan Linguistik Forensik Studi Kasus Penggunaan Bahasa dalam Twitter”
Hari, Tanggal	: Senin, 29 Oktober 2018
Pukul	: 08.00—09.30
Moderator	: Toha Machsum, M.Ag.
Pencatat	: 1. Septimariani 2. Vita Luthfia Urfa

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Medsos (media sosial) memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif penggunaan medsos, di antaranya, adalah bahwa komunikasi dapat dilakukan dengan murah dan mudah. Sementara itu, dampak negatif penggunaan medsos salah satunya adalah bahwa seseorang dapat berurusan dengan hukum. Banyak kasus hukum yang terjadi karena seseorang menggunakan medsos dengan tidak bijak. Contohnya, kasus Ahmad Dani yang berurusan dengan hukum di Jawa Timur beberapa waktu lalu. Dampak negatif antarindividu (kedua belah pihak) kolektif berdampak sosial. Data penghinaan yang diambil dari Twitter dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Pasal 311 menjelaskan penggunaan bahasa dalam medsos.
3. Objek kajian linguistik forensik berupa bahasa dokumen legal, bahasa polisi, dan penegak hukum, interaksi dalam ruang sidang, ataupun kepengarangan dan *plagiarisme*. Kajian linguistik dalam paparan ini berfokus pada kajian semantik.
4. Jenis penghinaan (Sughandhi, 1980) terdiri atas
  - a. penistaan/pencemaran nama baik dikenakan Pasal 310 ayat (1) KUHP atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
  - b. penghinaan dengan tulisan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
  - c. fitnah/tuduhan dikenakan Pasal 311 KUHP atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
  - d. penghinaan ringan mengandung kata-kata yang dianggap keji tidak perlu dibuktikan dan tuntutananya ringan;
  - e. pengaduan dengan memfitnah dikenakan Pasal 317; dan
  - f. tuduhan dengan memfitnah dengan perbuatan dikenakan Pasal 318.
5. Penafsiran menurut sistem adalah penafsiran yang tidak dapat berdiri sendiri.
6. Penafsiran secara autentik adalah penafsiran yang berdasarkan pada undang-undang.
7. Kategori menista terdiri atas pernyataan lisan, yaitu yang mengandung tuduhan/kata yang keji, menjelekkan orang lain, arah pernyataannya jelas, sengaja disebarkan kepada berbagai pihak, dan pernyataan bersumber dari yang bersangkutan.



8. Kategori penghinaan terdiri atas pernyataan tertulis, mengandung tuduhan, menjelekkan orang, dan pernyataannya tertulis.
9. Kategori memfitnah, tidak sesuai dengan kenyataan, tuduhan bersumber dari yang bersangkutan, bukan kata orang, dan sengaja disebar.
10. Kategori netral, yaitu tidak ada fitnah, tidak ada kata keji, dan tidak ada tuduhan.
11. Penghinaan dengan tulisan dapat dilihat secara tertulis dan dapat dibuktikan. Sasaran tuduhan atau penghinaan disebut dengan jelas dalam pernyataan.
12. Memfitnah dapat berupa kalimat tuduhan dan disampaikan ke masyarakat luas.
13. Penghinaan ringan yaitu pernyataan terhadap seseorang dengan kata-kata kasar, seperti *ngelonte* atau selingkuhan.
14. Pernyataan netral yaitu pernyataan yang tidak ada tuduhan dan tidak ada kata-kata keji.
15. Masyarakat harus mengetahui dan membedakan kalimat netral dan kalimat yang terjerat hukum. Masyarakat harus bijaksana dan santun dalam berbicara agar tidak masuk ranah hukum dan pejabat publik pun harus menjaga komunikasinya dengan baik.

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Leni Yahya  
Instansi : Universitas Andalas

#### **Pertanyaan:**

1. Apa saja bentuk ujaran kebencian?
2. Apa semua jenis makna dapat dianalisis dan diterapkan dalam ujaran kebencian?

#### **Jawaban:**

1. Ujaran kebencian tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.
2. Tidak semua makna dapat dianalisis dalam bentuk ujaran kebencian seperti halnya idiom dapat digunakan dalam konteks tertentu. Kata *sontoloyo* menjadi peyorasi yang mengalami pengembangan makna. Setiap makna harus dimengerti maksud dan artinya.

#### **Penanya 2**

Nama : Ahmad  
Instansi : PGRI Banjarmasin

#### **Pertanyaan:**

1. Postingan dalam Twitter secara tidak langsung dapat dijerat secara hukum atau tidak? Apabila kicauan dalam Twitter telah dihapus oleh si pengguna, apakah tetap diproses secara hukum? Jika sudah dihapus dan sudah disebarluaskan, apakah dengan meminta maaf dapat selesai?
2. Berapa lama hukuman ujaran kebencian?



**Jawaban:**

1. Permintaan maaf tidak dapat menghilangkan hukuman. Jika terdapat bukti secara tertulis, dapat diproses secara hukum sesuai dengan pasal yang dikenakan (KUHP atau undang-undang).
2. Hukuman ujaran kebencian maksimal enam tahun kurungan. Ujaran kebencian dalam surat kabar atau ujaran kebencian yang ditempel di tempat umum masuk ke dalam ranah hukum penghinaan ringan yang hukumannya lebih ringan, yaitu maksimal enam bulan kurungan.

**Penanya 3**

Nama : Wisman  
Instansi : BNKJ

**Pertanyaan:**

1. Apa ada kaitan tinjauan linguistik forensik dan medikal linguistik dengan latar belakang psikolinguistik?
2. Apa penggunaan kata ambigu dapat dimaknai dengan simbol?

**Jawaban:**

1. Kajian linguistik berkaitan dengan ilmu multidisipliner yang masih dapat bersinergi dengan ilmu pengetahuan lainnya, sedangkan forensik berkaitan dengan objek hukum.
2. Penggunaan kata ambigu tidak dapat dinyatakan dengan jelas karena tidak tersirat.

**Penanya 4**

Nama : Puguh  
Instansi : Papua Barat

**Pertanyaan:**

1. Apa semua orang berkompentensi dapat menjadi ahli bahasa/saksi bahasa?
2. Apa dasar untuk menjalankan tugas sebagai ahli bahasa atau apa ada sertifikasi ahli bahasa?
3. Apa standar menganalisis teks yang menjadi alat bukti analisis? Apakah kata per kata atau kebakuan bahasa?

**Jawaban:**

1. Di Indonesia terdapat sertifikasi ahli bahasa. Badan Bahasa adalah salah satu lembaga yang mengeluarkan sertifikasi tersebut. Ahli bahasa tidak datang dari perseorangan, tetapi dari instansi berwenang. Ahli bahasa tidak boleh memberikan keterangan yang berbeda dalam satu lembaga secara etika.
2. Ahli bahasa tidak hanya berasal dari Badan Bahasa saja, tetapi perguruan tinggi juga memberikan keterangan sebagai ahli bahasa dalam ranah hukum.
3. Seorang ahli bahasa harus mengetahui pasal yang dikenakan dan kategori kesalahan. Alat bukti tuduhan dapat dibuktikan secara tertulis.



### **Pertanyaan 5**

Nama : Wiratman

Instansi : Surabaya

#### **Pertanyaan:**

1. Bagaimana kadar penentuan kebencian?
2. Bagaimana jika ujaran kebencian diucapkan dengan tidak serius?
3. Bagaimana jika mengutip ujaran kebencian dari media cetak?

#### **Jawaban:**

1. Kadar penentuan kebencian dapat dilihat dari menista, mencemarkan nama baik, dan menghina dalam bentuk tertulis. Selain melalui bahasa, kadar kebencian juga dapat dilakukan dengan pendekatan lain.
2. Ujaran kebencian yang dilakukan secara bercanda tidak akan bermasalah jika kedua pihak tidak merasa dirugikan, tetapi jika seseorang tidak menerima ujaran tersebut, pengujar dapat dilaporkan ke polisi. Jadi, setiap orang berbicara harus ada batasannya.
3. Pembaca harus membedakan narasi wartawan dan kutipan seseorang. Apabila tulisan berupa kutipan, penulis dapat mengklarifikasi. Tanda petik dapat digunakan penulis untuk membuktikan bahwa tulisannya berasal dari ujaran orang lain.

#### **Isu-Isu Penting:**

1. Masyarakat harus lebih berhati-hati dan bijak menggunakan media sosial karena media sosial dapat dijadikan alat bukti yang kuat dalam ranah hukum. Jika terbukti menista, menghina, dan menyebarkan fitnah, seseorang dapat diproses secara hukum sesuai dengan pasal yang berlaku. Hukuman yang diberikan dilihat dari jenis kesalahannya.
2. Penggunaan kutipan langsung dan pernyataan yang ditulis sendiri harus dapat dibedakan sehingga masyarakat diminta bijak dalam menyebarkan informasi yang benar.
3. Kadar penentuan ujaran kebencian dapat dilihat dari pencemaran nama baik, menghina dalam bentuk tertulis, dan tidak bisa hanya dengan pendekatan bahasa. Harus ada bukti dan pasal yang kuat untuk membuktikannya.



## 6. Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia Suku Bajo Sampela: Pendekatan Pragmatik

### KESANTUNAN IMPERATIF BAHASA INDONESIA SUKU BAJO SAMPELA: PENDEKATAN PRAGMATIK

*Politeness of Indonesian Imperatives Bajo Sampela Ethnic: Pragmatics Approach*

Susiati, Risman Iye, dan A. Yudianti Tenriawali

Universitas Iqra Buru  
kaledupa123@gmail.com

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan (1) wujud kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS; (2) faktor yang memengaruhi kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dengan teknik partisipasi model moderat, rekam, dan catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, wujud kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS mencakup hal-hal berikut: (1) panjang pendek tuturan; kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS dalam aspek ini mencakup keduanya, yakni tuturan yang jumlah konstituen katanya panjang dan konstituen katanya pendek. Hal ini disebabkan oleh penguasaan kosakata bahasa Indonesia SBS. Makin tinggi penguasaan kosakata, makin panjang kalimat yang akan dituturkannya dan makin sedikit penguasaan jumlah kosakatanya, makin pendek kalimat yang akan dituturkannya. (2) Urutan tutur; kadar kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS yang paling tinggi dalam aspek ini, yakni jika informasi nonimperatif mendahului tuturan imperatifnya. (3) Intonasi tuturan dan isyarat-isyarat kinesik; kadar kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS dalam aspek intonasi tergolong bersuara keras sehingga harus diimbangi dengan kinesik yang menyertai tuturan tersebut. (4) Pemakaian ungkapan penanda kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS, yakni dalam wujud imperatif perintah, suruhan, permintaan, permohonan, desakan, bujukan, imbauan, persilaan, ajakan, izin, mengizinkan, larangan, harapan, dan anjuran. *Kedua*, faktor yang memengaruhi kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS antara lain status sosial (perbedaan umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosiokultural), kekuasaan (*power*), keakraban, dan ketidaktegasan.

**Kata-kata kunci:** kesantunan, imperatif, bahasa Indonesia, suku Bajo Sampela

#### Abstract

*This study aims to explain (1) SBS Indonesian imperative manners; (2) factors affecting SBS Indonesian imperative politeness. This research is a type of qualitative research. Data were collected using observation method with moderate model moderation, record, and record technique. The results showed that: first, the SBS Indonesian imperative manifestation includes the following: (1) short length of speech; SBS's Indonesian imperative politeness in this aspect involves both, namely the speech whose number of constituents is long and the constituents are short. This is due to the mastery of Indonesian vocabulary SBS, the higher the vocabulary mastery, the longer the sentence will be told and the less mastery of vocabulary, the shorter the sentence will be told. (2) speech sequence; the highest*





*level of SBS Indonesian imperative politeness in this aspect, i.e. if nonimperative information precedes its imperative speech. (3) speech intonation and kinesic cues; SBS imperative English politeness in the aspect of intonation is voiced loud, so it must be balanced with kinesic accompanying the speech. (4) the use of the expression of SBS imperative modesty in the form of imperative command, order, request, request, insistence, persuasion, appeal, madness, invitation, permission, permit, prohibition, hope, and suggestion. **Second**, the factors that affect SBS Indonesian language imperatives include social status (age, gender, and sociocultural background), power, intimacy, and indecision.*

**Keywords:** *politeness, imperative, Indonesian, Bajo Sampela ethnic*

## PENDAHULUAN

Bahasa merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Apalagi dalam kehidupan tersebut terjadi proses interaksi yang menghubungkan antarsesama manusia. Dalam proses interaksi sosial, pelakunya selalu menggunakan alat, yakni bahasa untuk menyampaikan ide, gagasan, harapan, dan sebagainya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak etnis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap kelompok etnis memiliki bahasa dan dialek masing-masing. Dalam tiap-tiap etnis, bahasa dan dialek selalu digunakan dalam berkomunikasi antarsesama masyarakat. Selain itu, dalam kelompok tersebut juga memiliki budaya dan latar belakang sosial yang berbeda dengan beragam jenis *vernacular*. Oleh karena itu, berbagai bahasa dan budaya tersebut harus dipertahankan untuk menjaga keberagaman dalam persatuan sebagai warisan negara Indonesia (Wacana, 2013: 34).

Di Indonesia, pada umumnya masih sering terdengar stereotip-stereotip kesukuan yang menunjukkan karakteristik pengungkapan emosi suatu budaya atau kultural tertentu dalam proses interaksi sosial. Misalnya, orang-orang Jawa dan Sunda beranggapan bahwa mereka halus dan sopan, dan orang-orang Batak kasar, berwajah sangar dan suka berbicara dengan intonasi keras. Namun, Orang Batak sendiri menganggap bahwa mereka pemberani, terbuka, suka berterus terang. Apa yang orang Jawa dan Sunda anggap sebagai kekasaran, bagi orang Batak justru kejujuran. Apa yang orang Jawa dan Sunda anggap kehalusan, bagi orang Batak adalah kemunafikan dan kelemahan (Mulyana dalam Susiati, 2017: 5).

Susiati (2017) mengatakan bahwa dalam berinteraksi dengan suku Bajo banyak prototipe-prototipe pengalaman yang mengatakan bahwa suku Bajo itu tertutup, berbicara dengan intonasi keras, tidak sabaran, keras kepala, dan masih banyak lagi (hal. 5). Hal tersebut dipertegas oleh Suyuti (1995) yang menyatakan bahwa peluang bagi kelompok suku Bajo melakukan penolakan cukup tinggi akibat karakter budaya kelompoknya yang tertutup yang senantiasa memiliki tempat terisolasi (*segregatif*) dan memiliki falsafah menghindari konflik. Selain itu, suku Bajo tidak mudah percaya kepada orang asing, terlihat dari sikap suku Bajo yang membagi penempatan orang ke dalam dua kelompok, yaitu *sama* dan *bagai*. *Sama* merupakan sebutan bagi mereka yang masih termasuk dalam golongan suku Bajo (asli suku Bajo). *Bagai* adalah sebutan untuk mereka yang berasal di luar suku Bajo (tidak termasuk golongan asli suku Bajo) (hal. 58).



Suku Bajo merupakan suku yang bertempat tinggal di atas air laut (daerah pesisir) atau sering dijuluki rumah terapung. Suku ini banyak ditemui di Kabupaten Wakatobi. Wakatobi merupakan akronim dari empat pulau, yakni pulau Wangiwangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Dahulu nama Wakatobi adalah kepulauan Tukang Besi sekarang telah berubah nama menjadi Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Susati, 2017: 6).

Saat ini, permukiman suku Bajo di sepanjang perairan Kepulauan Wakatobi merupakan permukiman dengan jumlah populasi suku Bajo terbanyak di Nusantara. Lokasi permukiman suku Bajo di Wakatobi tersebar di beberapa pulau, di antaranya Wangiwangi, Kaledupa, dan Tomia. Jumlah penduduk suku Bajo di Kabupaten Wakatobi sekitar 10.000 jiwa. Menurut data sensus tahun 2014, suku Bajo di Wakatobi tersebar di Kecamatan Wangiwangi Selatan, yaitu di desa Mola dengan jumlah penduduknya 27,4%, di Kecamatan Kaledupa, yaitu di desa Samabahari (Sampela) dan Mantigola jumlah penduduknya 22,6%, di Kecamatan Kaledupa Selatan, yaitu di desa Lohoa jumlah penduduknya 12,7%, di Kecamatan Tomia, yaitu di desa Lamanggau jumlah penduduknya 3,6%.

Kemunculan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi suku Bajo dominan di ranah-ranah publik, baik itu antarsesama suku Bajo maupun suku Bajo dengan masyarakat luar. Ranah-ranah publik yang menjadi fokus peneliti adalah di pasar dan di lingkungan masyarakat suku Bajo Sampela (SBS). Penggunaan bahasa Indonesia di ranah-ranah tersebut dipakai sebagai perantara dalam melancarkan komunikasi dengan lawan tuturnya yang berasal dari luar SBS. Sementara itu, penggunaan bahasa Indonesia sesama suku Bajo di ranah-ranah tersebut karena di mata suku Bajo penggunaan bahasa Indonesia lebih berprestise. Chaer (2012) mengatakan bahwa orang Indonesia umumnya adalah bilingual, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa daerahnya. Bahasa Indonesia dominan digunakan sebagai bahasa kedua dan bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pertama (hal. 61).

Dalam berkomunikasi, baik disengaja maupun tidak disengaja selalu mempunyai tujuan. Tujuan dalam komunikasi menuntut para penuturnya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Setiap kita berkomunikasi ada hal yang harus diperhatikan agar lawan bicara dapat memosisikan dirinya sesuai dengan konteks yang sedang terjadi. Pembawaan SBS saat berkomunikasi cenderung terlihat kasar. Hal itu dipengaruhi oleh struktur bahasa daerah yang dominan mereka gunakan dalam berbahasa Indonesia.

Fenomena penggunaan bahasa Indonesia di kalangan SBS memungkinkan pula terlihatnya keunikan penggunaan kesantunan berbahasa Indonesia dalam SBS yang sering dianggap masih melanggar maksim-maksim prinsip kesantunan, baik itu dalam kesantunan saat bertanya, memerintah maupun menginformasikan sesuatu.

Kesantunan merupakan aspek kebahasaan yang amat penting karena dapat memperlancar interaksi antarindividu. Dalam dunia sociolinguistik, kesantunan selalu dikaitkan dengan rasa hormat, kesopanan, sikap yang baik, atau perilaku yang pantas. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan kesantunan dengan perilaku positif memperlihatkan bahwa kesantunan tidak hanya berhubungan dengan bahasa, tetapi juga dengan perilaku nonverbal. Hal yang menarik pula adalah bahwa kesantunan merupakan titik temu antara bahasa dan realitas sosial. Hal tersebut dipertegas oleh Duranti, 1997 (dalam Sailan, 2014) yang menyatakan bahwa fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, mempunyai hubungan dengan masyarakat,



kebudayaan, dan pikiran penuturnya, bahkan dengan dunia secara umum sehingga muncul adanya keterhubungan antara bahasa, masyarakat, budaya, dan pikiran manusia. Penggunaan kesantunan berbahasa tidak saja ditentukan oleh pilihan tuturannya, tetapi juga oleh aspek-aspek lain yang turut menentukan tingkat kesantunan, seperti usia, jarak sosial antara penutur dan petutur, situasi, waktu, tempat, dan tujuan tuturan. Oleh karena itu, dalam pemakaian bahasa perlu diperhatikan pula konteks yang menyertainya (hal. 23).

Penelitian ini, selain merujuk pada teori-teori atau pendapat yang dikemukakan oleh para pakar, juga akan meninjau tulisan atau hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, sekaligus sebagai penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang dimaksud, antara lain, dilakukan oleh Nurfamily (2015) yang meneliti tentang “Kesantunan Berbahasa Indonesia dalam Lingkungan Keluarga: Kajian Sosiopragmatik”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bukan kecerdasan kognitif atau kecerdasan otak yang menjadi satu-satunya penentu keberhasilan; Gunawan (2013) meneliti tentang “Wujud Kesantunan Berbahasa Mahasiswa terhadap Dosen di STAIN Kendari: Kajian Sosiopragmatik”. Hasil penelitiannya menemukan bahwa mahasiswa STAIN Kendari dalam menyatakan kesantunannya lebih memilih menggunakan modus kalimat deklaratif dan interogatif daripada kalimat imperatif, kecuali dalam keadaan terdesak. Selain itu, penggunaan modus kalimat lengkap dan berpola urutan menjadi pilihan mahasiswa STAIN karena dianggap memiliki kadar kesantunan yang tinggi jika dibandingkan dengan kalimat tidak lengkap dan berpola urutan inversi yang dianggap kurang santun; Kuntarto (2016) meneliti tentang “Kesantunan Berbahasa Ditinjau dari Perspektif Kecerdasan Majemuk”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa mesti diupayakan sejak anak masih kecil, baik di rumah maupun di sekolah karena kesantunan tidak semata-mata menyangkut kemampuan berbahasa, tetapi juga bentuk kecerdasan majemuk. Dalam realitas kehidupan, tinggi IQ tidak menjadi satu-satunya faktor penentu kesuksesan.

Wahidah (2017) meneliti tentang “Analisis Kesantunan Berbahasa Menurut Leech pada Tuturan Berbahasa Arab Guru Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putra Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017 (Kajian Pragmatik)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa guru mata pelajaran Tamrin Lughah Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putra perlu meningkatkan prinsip kesantunan berbahasa sehingga suasana nyaman dapat tercipta dalam praktek pembelajaran di kelas. Hal ini terlihat dari hasil analisis yang membuktikan bahwa guru mata pelajaran Tamrin Lughah Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putra masih sering melanggar prinsip kesantunan berbahasa atau cenderung tidak terlihat sopan.

Kesantunan imperatif di tiap-tiap daerah berbeda-beda. Hal itu akan terlihat pula dalam kesantunan imperatif berbahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia mempunyai kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam penggunaannya, itu tidak menutup kemungkinan pelaku bahasa dalam daerah tersebut konsisten dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud kesantunan imperatif berbahasa Indonesia SBS dan menjelaskan faktor yang memengaruhi kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS.



## LANDASAN TEORI

### *Pragmatik*

Leech (dalam Rahardi, 2005) mengatakan bahwa pragmatik merupakan bagian dari penggunaan tata bahasa (*language use*). Leech juga menunjukkan bahwa pragmatik dapat berintegrasi dengan tata bahasa atau gramatika yang meliputi fonologi, morfologi, dan sintaksis melalui semantik. Dalam banyak hal, gambaran yang demikian dapat dibenarkan, tetapi di dalam kenyataannya seringkali didapatkan bahwa bagian gramatika tertentu, misalnya, fonologi dapat berinteraksi dengan pragmatik tanpa harus melalui semantik terlebih dahulu (hal. 2).

Banyak para pakar linguistik yang menggeluti bidang kajian pragmatik menghasilkan pemikiran-pemikiran yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pragmatik. Levinson (1983), "*pragmatics is the study of those relations between language and context that are grammaticalized or encoded in the structure of a language*" (pragmatik adalah studi bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya. Konteks yang dimaksud tergramatisasi dan terkodifikasi sehingga tidak dapat dilepaskan dari struktur bahasanya) (hal. 2).

Hal yang sama diungkapkan oleh Parker (1986), pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal. Maksudnya, bagaimana satuan lingual tertentu digunakan dalam komunikasi yang sebenarnya. Parker pun membedakan pragmatik dengan studi seluk-beluk bahasa secara internal. Menurutnya, studi tata bahasa tidak perlu dikaitkan dengan konteks, sedangkan studi pragmatik mutlak dikaitkan dengan konteks (hal. 45).

Rahardi (2005) mengemukakan bahwa pragmatik mengkaji maksud penutur dalam menuturkan sebuah satuan lingual tertentu terhadap sebuah bahasa karena yang dikaji di dalam pragmatik adalah makna sehingga dapat dikatakan bahwa pragmatik dalam banyak hal mempunyai kesejajaran dengan semantik yang juga mengkaji makna.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah studi yang mempelajari tentang penggunaan dan pemaknaan suatu bahasa berdasarkan konteks yang menyertainya.

### *Tindak Tutur*

Teori tindak tutur secara khusus telah dibahas oleh dua ahli filsafat, yaitu John Austin, 1962 dan John Searle, 1983 (dalam Sailan, 2014). Dalam formulasi keduanya menegaskan bahwa bahasa yang digunakan tidak hanya menggambarkan dunia, tetapi untuk melakukan tindakan yang dapat diindikasikan dari tampilan ujaran atau tuturan itu sendiri.

Menurut Austin (1962), setidaknya terdapat tiga macam tindak tutur yang harus dipahami bersama oleh peserta tutur.

- (1) Tindak lokusioner; tindak lokusioner atau lokusi adalah tindak berbicara dengan mengucapkan sesuatu dengan makna kata sesuai dengan makna kamus atau makna kalimat menurut kaidah sintaksisnya.
- (2) Tindak ilokusioner; tindak ilokusioner atau ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu, yakni kita berbicara tentang maksud, fungsi, atau daya ujaran yang bersangkutan dan bertanya untuk apa ujaran itu dilakukan.
- (3) Tindak perlokusioner; tindak perlokusioner atau perlokusi adalah tindak tutur yang mengacu pada efek yang dihasilkan oleh penutur dengan mengatakan sesuatu (hal. 45).



### ***Solidaritas Berbahasa***

Kegiatan bertutur selalu dihadapkan dengan topik yang ingin dikatakannya, bagaimana cara mengatakannya, serta jenis kalimat, kata, dan bunyi tertentu agar dapat selaras dengan apa yang dikatakannya. Bentuk solidaritas berbahasa dan variasi linguistik lahir dari keragaman lapisan sosial dalam masyarakat yang meliputi status sosial, ras, suku, gender, dan pekerjaan.

Bahasa sebagai bagian dari aktivitas sosial manusia dalam merefleksikan solidaritas bertujuan untuk menghargai mitra tutur agar lebih dekat dan berterima untuk menyatakan diri bahwa si penutur berada di kelompok atau di komunitas lawan bicara. Kesamaan berbahasa tidak hanya merefleksikan solidaritas sosial, tetapi juga berguna untuk memelihara solidaritas berbahasa. Jika solidaritas dikaitkan dengan kesantunan berbahasa, konsep 'muka' menjadi gagasan utama (Nurfamily, 2015).

Menurut Brown dan Levinson (1987), ada dua jenis muka yang mengacu pada kesantunan, yaitu muka positif (*positive face*) dan muka negatif (*negative face*). Jika diamati dengan saksama, *positive face* menunjuk ke solidaritas bahasa karena lebih mengutamakan penggunaan bahasa informal dan menawarkan pertemanan. Sementara itu, *negative face* lebih pada penggunaan formalitas bahasa yang mengacu pada perbedaan dan ketidaklangsungan serta menunjukkan hasrat untuk tidak diganggu dalam tindakannya (hal. 56).

Manik (dalam Sailan, 2014) menegaskan bahwa seseorang bisa melakukan solidaritas berbahasa saat berkomunikasi dengan mempertimbangkan (a) penutur yang berbahasa standar dan berbahasa daerah (bilingual) atau pengujar yang menguasai lebih dari dua bahasa (multilingual), (b) penutur yang sensitif dengan lawan bicara, (c) penutur yang menyadari register (siapa yang berbicara, kepada siapa, apa yang dibicarakan, dan dengan cara apa). Seorang penutur dapat melakukan solidaritas berbahasa jika dia mengetahui dan menyadari (a) adanya gaya bahasa di antara beda generasi (anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan nenek), (b) beda posisi (status sosial), (c) beda situasi (santai, formal), (d) beda tempat (di stasiun, di kelas, di pasar, dsb) (hal. 65).

### ***Pengertian Kesantunan***

Kesantunan bersifat relatif di dalam masyarakat. Ujaran tertentu biasa dikatakan santun di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, tetapi di kelompok masyarakat lain bisa dikatakan tidak santun. Hal itu dipertegas oleh Zamzani, et al. (2010) bahwa kesantunan merupakan perilaku yang diekspresikan dengan cara yang baik atau beretika. Kesantunan merupakan fenomena kultural sehingga apa yang dianggap santun oleh suatu kultur mungkin tidak demikian halnya dengan kultur yang lain (hal. 2).

Kesantunan mencakup intonasi yang menyatakan bahwa intonasi berhubungan dengan tinggi-rendah suara, panjang-pendek suara, keras-lemah, jeda, dan irama yang menyertai tuturan. Intonasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni intonasi yang menandai berakhirnya suatu kalimat atau intonasi final dan intonasi yang berada di tengah kalimat atau intonasi nonfinal. Intonasi berfungsi untuk memperjelas maksud tuturan. Oleh karena itu, intonasi dapat dibedakan lagi menjadi intonasi berita, intonasi tanya, dan intonasi seruan. Intonasi seruan itu sendiri masih dapat diperinci lagi menjadi intonasi perintah, ajakan, permintaan, dan permohonan, Sunaryati (dalam Rahardi, 2005: 67).



### ***Teori Kesantunan Berbahasa***

Kesantunan berbahasa merupakan salah satu kajian dari ilmu pragmatik. Jika seseorang membahas mengenai kesantunan berbahasa, berarti itu juga membicarakan pragmatik. Tujuan kesantunan berbahasa adalah membuat suasana berinteraksi menyenangkan, tidak mengancam muka, dan efektif. Beberapa pakar yang membahas kesantunan berbahasa adalah Lakoff (1972), Fraser (1978), Brown dan Levinson (1978), dan Leech (1983). Teori mereka itu pada dasarnya beranjak dari pengamatan yang sama, yaitu bahwa di dalam komunikasi yang sebenarnya penutur tidak selalu mematuhi Prinsip Kerja Sama Grice yang terdiri atas maksim kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara/pelaksanaan itu. Perbedaannya, antara lain, terletak pada bagaimana pakar-pakar itu melihat wujud kesantunan kaidah (kaidah sosial), sedangkan Fraser serta Brown dan Levinson itu (mungkin karena yang paling mendalam), disusul oleh teori Leech.

Seperti yang dikemukakan Lakoff, Fraser, serta Brown dan Levinson (dalam Gunawan, 1994: 34), Lakoff berpendapat bahwa ada tiga kaidah yang perlu kita patuhi agar ujaran kita terdengar santun oleh pendengar atau lawan bicara kita. Ketiga kaidah kesantunan itu adalah formalitas, ketangkasan, dan persamaan atau kesekawanan. Di lain sisi, Fraser membahas kesantunan bukan atas dasar kaidah, melainkan atas dasar strategi.

Sejalan dengan beberapa pendapat sebelumnya, Brown dan Levinson menegaskan bahwa ada tiga skala yang dapat dipakai untuk mengukur suatu kesantunan dalam masyarakat. Ketiga skala itu adalah (a) jarak sosial di antara penutur dan mitra tuturnya, (b) hubungan kekuasaan atau wewenang relatif di antara penutur dan mitra tuturnya, dan (c) tingkat kedudukan relatif tuturan pada situasi tertentu dengan tuturan yang sama pada situasi yang lain.

Ada beberapa strategi yang menurut Brown dan Levinson (1987: 66) dapat dipedomani dalam kesantunan negatif, antara lain, sebagai berikut.

a) Strategi 1: Ungkapan secara tidak langsung

Salah satu strategi untuk menciptakan komunikasi yang santun dalam kegiatan berkomunikasi adalah mengungkapkan secara tidak langsung. Dalam hal ini, itu bertujuan agar apa yang disampaikan si penutur tidak menyinggung atau mengancam muka si mitra tutur. Maksud yang disampaikan atau yang diinginkan si penutur tidak diungkapkan secara tidak langsung, misalnya, “Minta tolong eee ambulkan dulu buku itu?”

b) Strategi 2: Gunakan pagar (*hedge*)

Menggunakan pagar pada saat mengungkapkan maksud juga merupakan salah satu strategi untuk menciptakan komunikasi yang santun. Dengan menggunakan bentuk tuturan berpagar, kelangsungan maksud di penutur akan dapat dikurangi sehingga terasa lebih santun jika dibandingkan dengan pengungkapan secara tidak langsung. Misalnya, “*Sebenarnya dari tadi sa mau kasitau, bisa tidak sa pinjam dayung kita?*”

c) Strategi 3: Bersikap pesimisme

Bersikap pesimis pada saat mengungkapkan maksud juga merupakan salah satu strategi untuk menciptakan komunikasi yang santun. Misalnya, “*Saya ingin minta tolong, tetapi saya takut Bapak tidak mau.*”



- d) Strategi 4: Meminimalkan paksaan  
Salah satu strategi untuk menciptakan komunikasi yang santun adalah tidak membebani mitra tutur atau meminimalkan paksaan kepada mitra tutur. Misalnya, *“Maaf sa mengganggu sebentar ini?”*
- e) Strategi 5: Berikan penghormatan  
Salah satu strategi untuk menciptakan komunikasi yang santun dalam kegiatan berkomunikasi adalah memberikan penghormatan.
- f) Strategi 6: Ungkapan permohonan maaf  
Mengungkapkan permohonan maaf ketika bertutur juga merupakan salah satu strategi untuk menciptakan komunikasi yang santun. Pada umumnya mitra tutur akan merasa dihargai apabila bertutur menggunakan permohonan maaf.
- g) Strategi 7: Menggunakan bentuk impersonal  
Salah satu strategi untuk menciptakan komunikasi yang santun dalam kegiatan berkomunikasi adalah tidak menyebutkan penutur dan pendengar. Misalnya, *“Tampaknya komputer ini perlu dipindahkan.”*
- h) Strategi 8: Ujaran tindak tutur itu sebagai ketentuan yang bersifat umum  
Misalnya, *“Penumpang tidak dibenarkan merokok di dalam bus.”* Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kesantunan berbahasa adalah etika dalam berbahasa dengan tujuan untuk mencapai suasana kenyamanan dan menyenangkan antara si penutur dan si petutur.

### ***Wujud Pragmatik Imperatif***

Kalimat imperatif mengandung maksud memerintah atau meminta agar mitra tutur melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan penutur. Kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia dapat berkisar mulai dari suruhan yang sangat keras atau kasar sampai dengan permohonan yang sangat halus atau santun. Kalimat imperatif dapat pula berkisar mulai dari suruhan untuk melakukan sesuatu sampai dengan larangan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia itu kompleks dan banyak variasinya. Bahasa Indonesia juga membicarakan tentang wujud kesantunan imperatif. Wujud kesantunan imperatif mencakup dua hal, yaitu wujud formal imperatif atau struktural dan wujud pragmatik imperatif (Rahardi, 2005). Secara formal, tuturan imperatif meliputi dua macam wujud, yaitu imperatif aktif dan imperatif pasif. Wujud pragmatik imperatif adalah realisasi maksud imperatif menurut makna pragmatiknya. Makna tersebut dekat hubungannya dengan konteks situasi tutur yang melatarbelakangi munculnya tuturan imperatif itu.

Rahardi (2005) mengatakan bahwa wujud pragmatik imperatif dalam bahasa Indonesia tidak selalu menjadi konstruksi imperatif. Artinya, wujud pragmatik imperatif dalam bahasa Indonesia tersebut dapat berupa tuturan yang bermacam-macam: dapat berupa konstruksi imperatif dan dapat pula berupa konstruksi nonimperatif (hal. 88).

Adapun yang dimaksud dengan wujud pragmatik adalah realisasi maksud imperatif dalam bahasa Indonesia apabila dikaitkan dengan konteks situasi tutur yang melatarbelakanginya. Makna pragmatik imperatif tuturan yang demikian itu sangat ditentukan oleh konteksnya. Konteks yang dimaksud dapat bersifat ekstralinguistik dan intralinguistik. Ditemukan sedikitnya tujuh belas macam makna pragmatik imperatif di dalam bahasa Indonesia, baik dalam bentuk tuturan langsung maupun tuturan tidak langsung, yaitu (1) tuturan yang mengandung



makna pragmatik imperatif perintah; (2) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif suruhan; (3) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permintaan; (4) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permohonan; (5) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif desakan; (6) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif bujukan; (7) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif imbauan; (8) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif persilaan; (9) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif ajakan; (10) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif izin; (11) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif mengizinkan; (12) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif larangan; (13) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif harapan; (14) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif umpatan; (15) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif pemberian ucapan selamat; (16) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif anjuran; dan (17) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif *ngelulu* (Rahardi 2005: 93).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007) mengemukakan bahwa jenis penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (hal. 3).

Pendekatan kualitatif diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu latar konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisis data yang telah diperoleh, dan mendeskripsikannya dalam bentuk penggambaran bahasa sebagaimana adanya (Sudaryanto, 1993: 62). Dengan demikian, pendeskripsian data dalam penelitian ini berupa tuturan imperatif bahasa Indonesia SBS dari segi wujud atau bentuk dan faktor dengan menggunakan konsep-konsep teori yang telah dikembangkan oleh para ahli pragmatik.

### **Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian ini adalah masyarakat SBS dengan kategori usia masa dewasa (18—25 tahun) dan masa tua (26—65 tahun). Penetapan kategori usia ini dipilih karena masih tergolong produktif dalam beraktivitas. Kriteria penetapan responden menurut Samarin (1993), antara lain, adalah memiliki alat bicara lengkap, secara psikologi memperlihatkan sikap, cerdas, dan dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik (hal. 55).

Jenis data penelitian ini adalah data lisan berupa tuturan emosi bahasa Indonesia verbal dan nonverbal suku Bajo Sampela. Data adalah fenomena lingual khusus yang mengandung dan berkaitan langsung dengan masalah yang dimaksud (Sudaryanto, 1993: 5).





## Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi. Kartono (1980) observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena dan dilakukan dengan cara mengamati objek kajian dalam konteksnya.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data lisan yang disertai perilaku, yaitu berupa tuturan imperatif bahasa Indonesia suku Bajo Sampela. Teknik-teknik yang digunakan untuk melengkapi metode observasi tersebut adalah sebagai berikut.

### 1. Teknik Observasi Partisipasi

Melakukan kegiatan menyadap dengan berpartisipasi dalam pembicaraan, menyimak pembicaraan, dan mengamati perilaku objek yang diteliti. Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Sibarani (2004) metode observasi partisipasi ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diobservasi, dideskripsi, dan dianalisis. Teknik observasi partisipasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi yang moderat (*moderate participation*). Spradley (dalam Sugiyono, 2010) mengatakan bahwa di dalam observasi partisipasi yang moderat terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipasi dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.

### 2. Teknik Rekam

Teknik ini digunakan untuk merekam peristiwa-peristiwa yang secara potensial banyak menggunakan tuturan emosi.

### 3. Teknik Catat

Dari hasil rekaman, data-data berupa tuturan yang diucapkan responden dicatat, selanjutnya diseleksi dan diidentifikasi berdasarkan jenis, bentuk, dan fungsi penggunaan tuturan emosi tersebut.

## Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti analisis data lapangan model Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1984: 43) terdapat empat tahap berikut.

### 1. Pengumpulan data

Data tuturan imperatif bahasa Indonesia SBS yang diperoleh dari hasil rekaman dicatat dalam catatan lapangan yang bersifat deskriptif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami).

### 2. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data untuk memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, menemukan, atau menjawab pertanyaan penelitian.



Sejumlah langkah analisis selama pereduksian data penelitian ini adalah (a) menyeleksi data tuturan imperatif bahasa Indonesia SBS yang terdapat dalam rekaman dan menyeleksi menurut wujud atau bentuk kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS dan faktor yang memengaruhinya; (b) mengklasifikasi data, menggolongkan data hasil seleksi yang diidentifikasi berdasarkan fokus masalah yang termasuk dalam penggolongan wujud pragmatik imperatif ..., wujud atau bentuk imperatif dan faktornya.

### 3. Penyajian data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan sajian data adalah menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

## PEMBAHASAN

**1. Wujud Linguistik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia SBS** Kesantunan linguistik imperatif bahasa Indonesia SBS mencakup hal-hal berikut: (1) panjang pendek tuturan, (2) urutan tutur, (3) intonasi tuturan dan isyarat-isyarat kinesik, (4) pemakaian ungkapan penanda kesantunan.

### a. Panjang Pendek Tuturan

Panjang pendeknya tuturan imperatif yang digunakan dalam menyampaikan maksud kesantunan penutur itu dapat diidentifikasi dengan sangat jelas. Berikut data yang didapatkan dalam tuturan imperatif SBS. Berikut contoh tuturannya.

- 1) *Ko bantu sa bawa ini kue* 'kamu bantu saya bawa ini ku'
- 2) *Ko bantu bawa ini dulu kue eee* 'kamu bantu bawa ini dulu kue eee'
- 3) *Ko bantu sa dulu, bawa ini kue eee!* 'kamu bantu saya dulu, bawa ini kue eee'
- 4) *Ko bantu sa dulu, bawakan ini kue eee* 'kamu bantu saya dulu, bawakan ini kue eee'
- 5) *Tabe, ko bantu sa dulu* 'bawakan ini kue eee'  
(*tabe* 'permisi, kamu bantu saya dulu, bawakan ini kue eee')

Tuturan-tuturan di atas masing-masing memiliki jumlah kata dan ukuran panjang pendek yang tidak sama, yakni secara berurutan makin memanjang wujud tuturannya. Tuturan (1) terdiri atas enam kata, tuturan (2) terdiri atas enam kata, tuturan (3) dan (4) berjumlah tujuh kata, tetapi pada tuturan (4) kata *bawa* pada tuturan (3) berubah menjadi *bawakan* yang berubah wujudnya dari bentuk kata *bawa*. Tuturan (5) terdiri atas delapan dan merupakan tutur panjang dari tuturan-tuturan imperatif sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dari kelima tuturan itu tuturan (5) berkadar kesantunan paling tinggi.

Namun, perlu diketahui pula bahwa pemerolehan bahasa Indonesia dalam masyarakat SBS belum sepenuhnya maksimal sehingga masih sering ditemukan penggunaan tuturan imperatif dalam wujud kata atau frasa yang tergolong santun.

**Konteks:** Tuturan tersebut dituturkan oleh seorang ibu (A) kepada peneliti (B) yang sementara melewati jembatan rusak di lingkungan SBS.

- 6) B: *Sore Ibu, permisi!*  
A: *Eee pelan-pelan!*



**Konteks:** Tuturan tersebut dituturkan oleh si A kepada si B. Si B menanyakan persetujuan si A untuk mengizinkan anaknya pergi ke Pulau Hoga.

7) *B: Ikut ke Hoga besok Sela eee?*

*A: Jangan, dia.*

Contoh (6) dan (7) di atas terlihat singkat konstituen kalimat si A, tetapi dalam komunikasi SBS hal itu sudah mengandung kesantunan imperatif. Hal itu disebabkan oleh penguasaan bahasa Indonesia yang belum maksimal oleh masyarakat SBS.

Dapat disimpulkan bahwa kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS tidak berbeda dengan kesantunan imperatif daerah-daerah lain yang sudah pernah diteliti bahwa apabila seorang penutur dapat memperpanjang tuturannya dalam bertutur dengan tidak mengubah makna dasarnya, penutur itu akan dikatakan sebagai orang yang santun. Namun, tidak sepenuhnya demikian yang berlaku pada masyarakat SBS. Penggunaan pronomina orang kedua *ko* 'kamu' dengan penunjukan langsung kepada orang yang dituju merupakan hal yang lumrah dalam komunikasi SBS. Penunjukan langsung dengan pronomina *ko* digunakan jika

- a) si penutur lebih tua daripada si petutur (petuturnya tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi atau punya jabatan dalam masyarakat dan belum berumah tangga);
- b) si penutur memiliki tingkat kesekawanan dengan si petutur (petuturnya tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi atau punya jabatan dalam masyarakat dan belum berumah tangga);
- c) si petutur mempunyai latar belakang pekerjaan, seperti guru, kerja di kantor, pronomina yang melekat padanya adalah *Pak, Ibu*; dan
- d) si petutur sudah berumah tangga, pronomina yang melekat padanya adalah *Bapak Reno* atau *Mama Reno* (Reno nama anak dari bapak/ibu tersebut).

#### **b. Urutan Tutur**

Seorang penutur akan mempertimbangkan tuturan yang digunakannya apakah tuturannya tersebut santun atau tidak santun. Untuk mengetahui kesantunan dalam suatu tuturan dapat dilihat dari urutan kata. Untuk mengetahui maksud-maksud tertentu, seorang penutur biasanya mengubah urutan tuturnya agar menjadi lebih keras, tegas, santun, dan sebagainya karena urutan tutur sebuah tuturan berpengaruh besar terhadap tingkat kesantunan. Berikut contoh urutan kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS.

**Konteks:** Tuturan (6) dan (7) dituturkan oleh seorang ibu kepada seorang anak di jembatan SBS saat ibu tersebut melihat ibu (orang tua) dari anak tersebut yang sementara menjajakan jualannya di sekitar lingkungan SBS.

8) *Kasian mama'mu itu, kasian tidak cape-cape cari uang. Ko perhatikan itu mamamu baik-baik.*

'Kasihannya mamamu itu, kasihan tidak lelah mencari uang. Kamu perhatikan mamamu itu baik-baik.'

9) *Ko perhatikan itu mama'mu baik-baik. Kasian mama'mu itu, kasian tidak cape-cape cari uang.*



‘Kamu perhatikan mamamu itu baik-baik. Kasihan mamamu itu, kasihan tidak lelah mencari uang.’

Tuturan (8) dan (9) mengandung maksud yang sama. Namun, kedua tuturan itu berbeda dalam hal kadar kesantunan. Urutan tutur untuk melihat kadar kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS tidak berbeda dengan urutan tutur pada penelitian-penelitian sebelumnya, yakni mendahulukan informasi lain yang melatarbelakangi imperatif yang dinyatakan selanjutnya. Tuturan (8) tampak lebih tinggi kadar kesantunan imperatifnya, yakni diawali dengan kemunculan informasi “*Kasian mama'mu itu, kasian tidak cape-cape cari uang*” yang mendahului tuturan imperatif “*Ko perhatikan itu mamamu baik-baik*”. Tuturan langsung kadar kesantunannya sangat tinggi jika dibandingkan dengan tuturan tidak langsung. Tuturan (9) tampak kadar kesantunannya lebih rendah karena didahului dengan tuturan imperatif setelah itu diikuti oleh informasi yang melatarbelakanginya.

Dapat disimpulkan bahwa urutan tutur yang diawali dengan informasi nonimperatif di depannya memiliki kadar kesantunan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tuturan imperatif yang mendahului informasi nonimperatifnya.

### c. Intonasi Tuturan dan Isyarat-isyarat Kinesik

Intonasi tuturan selalu berbeda-beda bergantung pada konteks yang menyertainya. SBS saat berkomunikasi terkenal dengan intonasi yang keras sehingga kebanyakan orang selalu beranggapan bahwa SBS itu berkarakter keras kepala dan tidak mudah menerima saran dari orang luar. Namun, perlu diketahui bahwa dalam berkomunikasi ada aspek yang sangat menentukan apakah tuturan tersebut santun atau tidak santun, yakni kegiatan nonverbal (kinesik). Berikut ini contoh intonasi tuturan dan kinesik kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS.

#### Konteks:

Tuturan (10) dituturkan dengan intonasi rendah, wajah tersenyum, tangan mengusap bahu petutur sambil mata melirik manja.

10) *Jangan dulu ko bawa!*

2 2 3 3 3 3 3 3 1 # ‘Jangan dulu kamu bawa!’

#### Konteks:

Tuturan (11) dituturkan dengan intonasi keras, wajah masam, mata melotot sambil jari telunjuk menunjuk petutur.

11) *Nanti salah kirim sama itu hari, 2 3 3 3 3 3 3 3 // 2 3 3 3 jangan dulu ko bawa.*

3 3 3 3 3 3 1 #

‘Nanti salah kirim seperti itu hari, jangan dulu kamu bawa!’

Dari kedua contoh tuturan di atas, terlihat jumlah konstituen kata dalam tuturan tersebut berbeda-beda. Dari kedua tuturan di atas, jika hanya dilihat dari panjang pendeknya kalimat, tuturan (11) dianggap lebih santun daripada tuturan (10). Padahal, jika dipertimbangkan aspek intonasi dan kinesiknya, tuturan (10)-lah yang paling sopan karena dalam konteks tuturan (10) dituturkan dengan intonasi lembut serta adanya kinesik yang menunjukkan keakraban antara si



penutur dan petutur. Sementara itu, tuturan (11) dianggap tidak santun karena dalam konteks dituturkan dengan intonasi keras dan kinesiknya menampakkan muka negatif kepada si petutur. Untuk itu, penting sekali memperhatikan aspek intonasi dan nonverbal (kinesik) dalam suatu tuturan.

#### d. Pemakaian ungkapan penanda kesantunan

Kesantunan dalam tuturan imperatif bahasa Indonesia SBS dapat dilihat pula dari aspek penanda linguistik. Penggunaan penanda linguistik dalam kesantunan imperatif SBS yang ditemukan hanya beberapa dari penemuan-penemuan sebelumnya. Hal ini dikarenakan penguasaan kosakata bahasa Indonesia SBS belum maksimal. Berikut tabel penanda linguistik kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS.

**Tabel 1**  
**Penanda Linguistik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia SBS**

No.	Wujud Imperatif	Penanda Linguistik
1.	Imperatif Perintah	<i>sudah, mari, tabe, bias</i>
2.	Imperatif Suruhan	<i>kalau bisa, duluan-mi, bisa, biarlah, nanti, -mi</i>
3.	Imperatif Permintaan	<i>mari dulu, dulu, mau, tabe, kalau, bisa, bisakah</i>
4.	Imperatif Permohonan	<i>mohon, hanya ingin, harap</i>
5.	Imperatif Desakan	<i>kalau bisa, bias</i>
6.	Imperatif Bujukan	<i>ini, itu, mau-mi, singgah, cantik, indah, jangan begitu</i>
7.	Imperatif Imbauan	<i>tapi, perhatikan, sabar, agar, untuk, bagusnyanya, harusnya</i>
8.	Imperatif Persilaan	<i>mari, silakan, dulu, -mi</i>
9.	Imperatif Ajakan	<i>kalau bisa, kalau, bisa, bagaimana</i>
10.	Imperatif Permintaan Izin	<i>bisa, minta, tabe</i>
11.	Imperatif Mengizinkan	<i>-mi, -lah, sudah</i>
12.	Imperatif Larangan	<i>sebaiknya jangan, seharusnya jangan</i>
13.	Imperatif Harapan	<i>harap, kalau bisa, jika bisa, mudah-mudahan, berharap, harapan</i>
14.	Imperatif Anjuran	<i>Sebaiknya, bagusnyanya</i>



Tuturan kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS tidak terlepas dari faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang memengaruhi kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS adalah sebagai berikut

a. **Status Sosial**

Status sosial dalam masyarakat SBS sering menjadi faktor santun dan tidak santunnya dalam bertutur. Status sosial ditentukan oleh parameter perbedaan umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosiokultural.

(1) **Perbedaan Umur**

Kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS tampak pada perbedaan atau kesesuaian umur antara si penutur dan si petutur. Jika si penutur lebih tua daripada si petutur, kadar kesantunannya rendah karena tuturan imperatifnya secara langsung dan jarang menggunakan penanda lingual imperatif, sedangkan jika umur si penutur lebih muda daripada si petutur, tingkat kesantunannya tinggi karena tuturannya secara tidak langsung dan sering menggunakan penanda lingual imperatif. Perhatikan contoh berikut.

**Konteks:** si A (35) menyuruh si B (17) mengangkat batu dari dalam sampan ke kolong rumah.

12) A: *Sini! turun ko ke sampan, angkat itu batu bawa ke sini* 'Ke sini! Turun kamu ke sampan, angkat sana batu bawa ke sini.'

**Konteks:** si A (16) meminta si B (34) untuk membantunya mengangkat meja.

13) A: *Bapa'nya Rika, bisa bantu sa angkat.*  
'Bapaknya Rika, bisa bantu saya angkat meja ini.'

(2) **Jenis Kelamin**

Kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS tampak pada perbedaan jenis kelamin. Masyarakat SBS sangat menghormati dan menghargai laki-laki. Jika dalam konteks lingkungan keluarga si penutur seorang perempuan bertutur kepada laki-laki, kadar kesantunannya tinggi, yakni dengan menggunakan pronomina dan penanda lingual imperatif, misalnya, seorang istri memanggil suaminya *Bapak Reno bawakan dulu sa kayu itu*. Kata *Reno* merupakan nama anak mereka. Namun, jika laki-laki bertutur kepada perempuan, kadar kesantunannya rendah karena tanpa menggunakan penanda lingual imperatif, tetapi penggunaan pronomina ada, yakni seorang suami memanggil dengan sebutan yang sama kepada sang istri *Mama Reno, mari itu kayu*. Jika dalam lingkungan masyarakat, tingkat kesantunan antara laki-laki dan perempuan di SBS relatif sama. Hal ini disebabkan adanya rasa keseganan antarmereka.

(3) **Latar Belakang Sosiokultural Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia**  
SBS tampak pada latar belakang masyarakatnya. Masyarakat SBS yang berpendidikan atau yang mempunyai jabatan tertentu dalam masyarakat lebih santun daripada masyarakat biasa. Hal tersebut disebabkan oleh pemerolehan bahasa Indonesia oleh si penutur dominan didapatkan di dunia bangku sekolah atau dalam forum-forum resmi. Masyarakat SBS



sudah mengenal pendidikan terlihat adanya pendirian sekolah dan kantor-kantor pelayanan masyarakat. Contohnya.

**Konteks:** si A (pengajar/guru) mengajak si B (warga/tukang) untuk melihat sampannya yang akan diperbaiki.

14) *Kemarin itu anu belum begini, mungkin dikasi anu ini dirusak sama anak-anak kemarin itu. Bagaimana ini Bapa' mungkin Bapa' bisa perbaiki dulu?*

'kemarin ini belum begini, mungkin dikasi rusak oleh anak-anak kemarin. Bagaimana ini Bapa' mungkin Bapa' bisa memperbaikinya dulu?'

b. **Kekuasaan (*Power*)**

Kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS dipengaruhi oleh kekuasaan (*power*). Masyarakat SBS sangat menghormati orang-orang yang berpendidikan, baik itu antarmereka maupun di luar suku mereka. Seorang kepala desa yang memiliki jabatan tertinggi dengan peringkat kekuasaan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakatnya jika bertemu dengan seorang yang berlatar belakang pendidikan tinggi, peringkat kekuasaan kepala desa tersebut merendah. Hal itu disebabkan oleh karakter budaya kelompoknya yang tertutup yang senantiasa memiliki tempat terisolasi (*segregatif*) dan memiliki falsafah menghindari konflik.

c. **Keakraban**

Kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS dipengaruhi oleh keakraban antara si penutur dan si petutur. Keakraban di lingkungan keluarga dan masyarakat menjadi penentu kesantunan dalam masyarakat SBS. Seberapa pun akrabnya anggota keluarga, teman, jika di dalamnya terdapat anak, adik, teman, ataupun kakak yang berpendidikan tinggi atau mempunyai jabatan (guru atau perangkat desa), kesantunan itu akan ada. Salah satu penanda lingual kesantunan dalam keakraban adalah pronomina, misalnya, seorang kakak ingin menyuruh adiknya yang bernama Toni (seorang guru di sekolah) untuk memperbaiki posisi sampan. Kalimatnya adalah *Pak Toni, perbaikikan dulu tempat sampan itu.*

d. **Ketidaktegasan**

Kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS dipengaruhi oleh ketidaktegasan antara si penutur dan si petutur. Ketidaktegasan tersebut dilakukan untuk saling menunjukkan muka positif antarpnutur dan petutur. Hal itu berlaku pula dalam kesantunan imperatif masyarakat SBS. Namun, masyarakat SBS tingkat kesantunannya tinggi dalam menerapkan ketidaktegasan jika berkomunikasi dengan orang di luar suku Bajo (*bagai*) daripada dengan sesama SBS (*sama'*). Hal itu disebabkan budaya kelompok mereka selalu berpikiran bahwa suku mereka rendah sehingga jika mereka berkomunikasi dengan orang di luar suku merupakan suatu kebanggaan tersendiri.



## PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi temuan dalam penelitian ini terkait wujud kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS dan faktor yang memengaruhi kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS.

1. Wujud kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS mencakup hal-hal berikut.
  - (1) panjang pendek tuturan; kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS dalam aspek ini mencakup keduanya, yakni tuturan yang jumlah konstituen katanya panjang dan konstituen katanya pendek. Hal itu disebabkan oleh penguasaan kosakata bahasa Indonesia SBS, makin tinggi penguasaan kosakata, makin panjang kalimat yang akan dituturkannya dan makin sedikit penguasaan jumlah kosakatanya, makin pendek kalimat yang akan dituturkannya.
  - (2) urutan tutur; kadar kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS yang paling tinggi dalam aspek ini, yakni jika informasi nonimperatif mendahului tuturan imperatifnya.
  - (3) intonasi tuturan dan isyarat-isyarat kinesik; kadar kesantunan imperatif bahasa Indonesia dalam aspek intonasi tergolong bersuara keras sehingga harus diimbangi dengan kinesik yang menyertai tuturan tersebut.
  - (4) pemakaian ungkapan penanda kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS, yakni dalam wujud imperatif perintah, suruhan, permintaan, permohonan, desakan, bujukan, imbauan, persilaan, ajakan, izin, mengizinkan, larangan, harapan, dan anjuran.
2. Faktor yang memengaruhi kesantunan imperatif bahasa Indonesia SBS, antara lain, status sosial (perbedaan umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosiokultural), kekuasaan (*power*), keakraban, dan ketidaktegasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J.L. (1962). *How to Do Things with Words*. New York: Oxford University Press.
- Brown, P. and S. C. Levinson. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chaer, Abdul. (2012). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. (2010). *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan, Fahmi. (2013). Wujud Kesantunan Berbahasa Mahasiswa terhadap Dosen di STAIN Kendari (Kajian Sosiopragmatik). *Journal Arbitrer*, 1 (1): 8—18.
- Kartono, Kartini. (1980). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni.
- Kuntarto, Eko. (2016). Kesantunan Berbahasa Ditinjau dari Perspektif Kecerdasan Majemuk. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16 (2): 58—73.
- Leech, Geoffrey. (1993). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Levinson, Stephen C. (1983). *Pragmatics*. London: Cambridge University Press.
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurjamily, Wa Ode. (2015). Kesantunan Berbahasa Indonesia dalam Lingkungan Keluarga (Kajian Sosiopragmatik). *Jurnal Humanika*, 3 (15): 19—36.





- Parker, Frank. (1986). *Linguistics for Non-Linguistics*. London: Little, Brown and Company Inc.
- Rahardi, R. Kunjana. (2005). *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sailan, Zalili. (2014). “Solidaritas dan Kesantunan Berbahasa (Telaah Pragmatik)”. Dalam *Pidato Ilmiah*. Kendari.
- Samarin, W.J. (1993). *Ilmu Bahasa Lapangan*. (J.S Badudu, penerjemah). Yogyakarta: Kanisius.
- Sibarani, Robert. (2004). *Antropolinguistik: Antropologi Linguistik, Linguistik Antropologi*. Medan: Poda.
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susiati. (2017). “Tuturan Emosi Bahasa Indonesia Verbal dan Nonverbal Suku Bajo Sampela: Kajian Psikolinguistik”. Makassar: Tesis Universitas Hasanuddin.
- Suyuti, Nasruddin, dkk. (1995). “Pengkajian Kependidikan”, 6 (1): 19—36.
- Wahidah, Yeni Lailatul dan Hendriana Wijaya. (2017). Analisis Kesantunan Berbahasa Menurut Leech pada Tuturan Berbahasa Arab Guru Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putra Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017 (Kajian Pragmatik). *Jurnal Al Bayan*, 9 (1): 1—16.
- Yule, George. (2006). *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zamzani, Tadkiroatun Musfiroh, Siti Maslakhah, Ari Listiyorini, dan Yayuk Eni Rahayu. (2010). Pengembangan Alat Ukur Kesantunan Bahasa Indonesia dalam Interaksi Sosial Formal Bersemuka. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 17 (2): 1—18.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 2 Kelompok 4**

Pembicara : Dr. Susiati  
Judul Makalah : “Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia Suku Bajo Sampela: Pendekatan Pragmatik”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.00  
Moderator : Drs. S.S.T. Wisnu Sasangka, M.Pd.  
Pencatat : 1. Purwaningsih  
2. Ferdinandus Moses  
3. Kunkun Purwati

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Suku Bajo Sampela (SBS) mendiami daerah Wakatobi dan hidup di atas air laut (rumah terapung). Jumlah penduduk Suku Bajo Sampela (SBS) adalah yang terbesar di Nusantara, sekitar 10.000 jiwa.
2. Dalam berinteraksi dengan Suku Bajo Sampela (SBS), banyak pengalaman mengatakan bahwa suku Bajo itu tertutup, berbicara dengan intonasi keras, tidak sabaran, dan keras kepala. Hal itu dipengaruhi oleh kultur dan geografis tempat tinggal mereka.
3. Suku Bajo membagi penempatan orang ke dalam dua golongan, *sama* (artinya ‘sesama orang Bajo’) dan *bagai* (sebutan untuk orang di luar Bajo).
4. Kemunculan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi SBS dominan di ranah-ranah publik, baik itu antarsesama *sama* maupun *sama* dengan *bagai*. Mereka menguasai bahasa Indonesia, bahasa Wakatobi, dan bahasa Bajo.
5. Penggunaan bahasa Indonesia Suku Bajo Sampela (SBS) di ranah publik dipakai sebagai perantara dalam melancarkan komunikasi dengan orang *bagai*. Bahasa Indonesia juga sering digunakan SBS sesama *sama* di ruang publik karena dianggap lebih unggul (*prestige*).
6. Fenomena penggunaan bahasa Indonesia di kalangan SBS memungkinkan terlihatnya keunikan penggunaan kesantunan berbahasa Indonesia yang dianggap melanggar maksim-maksim prinsip kesantunan. Bahasa yang kita anggap kasar bagi mereka adalah bahasa yang halus.
7. Makin panjang tuturan, makin memiliki kadar kesantunan tinggi. Namun, dalam SBS tuturan pendek dapat dianggap santun karena dipengaruhi pemerolehan bahasa Indonesia yang masih kurang. Hal tersebut menandakan kadar penanda linguistik kesantunan yang sangat rendah.
8. Urutan tutur yang diawali dengan informasi nonimperatif memiliki kadar kesantunan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tuturan imperatif yang mendahului informasi nonimperatifnya.
9. Bahasa suku Bajo tidak hanya berkisar pada tuturannya (bunyi), tetapi juga secara kinesiknya (mimik wajah) untuk menandakan kesantunannya.
10. Faktor yang memengaruhi kesantunan imperatif SBS, antara lain, status sosial (perbedaan umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosiokultural), kekuasaan (*power*), keakraban, dan ketidaktegasan yang ditandai dengan penanda linguistik.



## **Tanya Jawab**

### **Penanya 1**

Nama : Rangga Asmara  
Instansi : Universitas Tidar

### **Pertanyaan:**

Salah satu ukuran kesantunan adalah unsur suprasegmental. Bagaimana penjelasan teoritisnya? Jika dibuatkan sistem kesantunannya, pola seperti ini mungkin dapat menjadi teori baru, tetapi memang harus dilandasi data yang kuat.

### **Jawaban:**

Salah satu ukuran kesantunan adalah tuturan yang dikembangkan oleh Rahardi. Melalui kajian suprasegmental, yang saya temukan pada struktur kesantunan bahasa Bajo memungkinkan ini menjadi temuan baru pada pola kesantunan berbahasa.

### **Isu-Isu Penting:**

1. Jika kita hanya terkungkung pada satu teori, penelitian kita tidak berkembang. Bahasa di Nusantara dapat menjadi surga bagi para peneliti bahasa jika digali lebih mendalam. Tidak menutup kemungkinan, kita juga dapat menciptakan teori yang baru, salah satunya adalah struktur pola kesantunan pada bahasa Bajo.
2. Pemerolehan bahasa Indonesia masyarakat suku Bajo sangat minim. Masyarakat ini banyak menyimpan keunikan bahasa, sastra, dan budaya yang besar. Namun, belum banyak peneliti yang sepenuhnya menyentuh mereka.



## 7. Honorifik dalam Tuturan Permintaan Anggota Legislatif Daerah di Indonesia

### HONORIFIK DALAM TUTURAN PERMINTAAN ANGGOTA LEGISLATIF DAERAH DI INDONESIA

*Syafruddin dan Abdul Rahman Rahim*  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
*syafuruddin64@rocketmail.com*

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara kualitatif honorifik dalam tuturan permintaan klarifikasi. Sumber data adalah anggota Legislatif Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Indonesia. Data dikumpulkan dengan metode sadap rekam dan wawancara. Peneliti sebagai instrumen kunci menggunakan teori kesantunan, tindak tutur, serta pragmatik untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) penggunaan honorifik untuk meminta klarifikasi umumnya dinyatakan secara wajar seperti dari bawahan terhadap atasan (asimetris) dan (b) penggunaan honorifik untuk meminta tindakan dinyatakan secara tegas, tetapi masih tergolong santun.

**Kata-kata kunci:** honorifik, permintaan, legislatif

#### PENDAHULUAN

Penggunaan bahasa tidak terlepas dari implementasi norma dan budaya. Sering dalam budaya tertentu terdapat norma-norma yang secara tidak tertulis mengatur bagaimana sebaiknya seseorang berbicara. Aturan tersebut merupakan norma yang ada pada masyarakat untuk mengatur bagaimana, kapan, dengan siapa, dalam konteks apa, dan dalam situasi bagaimana seseorang dianggap mampu berbicara dengan baik. Oleh karena itu, wujud, fungsi, strategi penyampaian, dan diksi penting dipertimbangkan dalam berkomunikasi. Honorifik merupakan salah satu bentuk pemilihan kata yang kerap kali digunakan dalam berkomunikasi. Honorifik adalah bentuk lingual yang dipakai untuk menyatakan penghormatan yang dalam bahasa tertentu dipakai untuk menyapa orang lain Kridalaksana, (2009: 85). Mitra tutur akan merasa ditempatkan pada posisi atau statusnya apabila honorifik diterapkan dengan tepat (Eelen, 2001: 13).

Dalam bahasa Indonesia, kata sapaan banyak jenisnya dan digunakan pembicara dalam menyapa lawan bicaranya secara bervariasi. Sumampouw (2000) membedakannya atas delapan jenis sapaan, yaitu (1) istilah kekerabatan, (2) nama diri, (3) nama profesi, (4) julukan (epitet), (5) pronomina persona kedua, (6) kata seru, (7) gelar, dan (8) pronomina penunjuk tempat. Kedelapan kata sapaan itu dapat dikombinasikan, misalnya, *saudara, pembaca, bapak, guru*.

Pemilihan suatu bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh dua faktor, yakni status dan fungsi. Status dapat diartikan sebagai posisi sosial lawan bicara terhadap pembicara. Status ini juga dapat diartikan sebagai usia. Adapun fungsi yang dimaksud adalah jenis kegiatan atau jabatan lawan bicara dalam pembicaraan.

Honorifik merupakan bagian dari kesantunan merupakan suatu norma yang kerap melekat dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Penggunaannya sangat penting di dalam masyarakat (Culpeper, J. 2015). Honorifik pada anak muda sudah



jarang digunakan (Ramadania, 2016). Oleh karena itu, jika kita menemukan kesantunan pada anak muda, sangat patut kita acungi jempol.

Perkembangan dalam masyarakat kadang membawa pergeseran terhadap norma sosial dan budaya, termasuk penggunaan honorifik dalam berbahasa. Pergeseran tersebut, antara lain disebabkan oleh proses demokratisasi dan reformasi yang sedang bergulir di Indonesia. Pergeseran tersebut tampak dalam penggunaan bahasa lisan anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai representasi masyarakat Indonesia yang cenderung berbahasa vulgar dan lugas ketika berinteraksi dengan mitra tuturnya atau pihak eksekutif (A. Sitorus, 2015). Selain itu, pernah pula diberitakan oleh sejumlah media massa yang dinilai sangat vulgar serta melanggar etiket dalam sebuah komunikasi politik (Kholidaharras, 2009).

Pergeseran tersebut yang diberitakan sejumlah media massa kurang dapat memberi contoh yang baik dan rawan konflik jika dibandingkan dengan era sebelum reformasi. Begitu pula sejak berubahnya sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju pemerintahan desentralisasi. Kedudukan DPRD dan pemerintah daerah menjadi sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Hal tersebut berimplikasi pada pemberian tugas dan kewenangan DPRD dalam mengontrol pemerintahan daerah. Namun, lembaga legislatif di daerah sering bertentangan dengan lembaga eksekutif. Banyak kasus menunjukkan seringnya terjadi perdebatan, bahkan pertengkaran tentang sesuatu dalam rapat dan diabaikannya sopan santun.

Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai salah satu komunitas pengguna bahasa dalam konteks lembaga formal negara dituntut dapat menggunakan bahasa dengan baik (sesuai dengan konteksnya), benar, dan menjunjung nilai kesantunan dalam berkomunikasi. Namun, penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah pemerintahan saat ini sangat memprihatinkan. Itu tecermin dari para elite politik yang sedang duduk di kursi amanat rakyat, baik yang di daerah maupun yang ada di pusat yang sering melanggar aturan atau prinsip dalam berkomunikasi di dalam melakukan sidang (Sukri, 2017).

Contoh latar sosial pertuturan yang tidak santun dan kacau terlihat ketika sidang paripurna pemilihan paket pimpinan DPR RI 2014—2019. Berbagai hal yang mendasari bahwa elite politik atau anggota legislatif belum menggunakan bahasa yang santun disebabkan penutur dipengaruhi oleh tujuan tutur, konteks tutur, kemampuan berbahasa, serta melanggar kaidah-kaidah kesantunan berbahasa.

Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, terjadinya perdebatan panas di dalam gedung legislatif sesungguhnya merupakan sesuatu yang sah dan wajar. Terlebih jika substansinya menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, perdebatan yang panas semacam itu merupakan sebuah keharusan. Namun, dalam banyak kasus, pemicu terjadinya berbagai perdebatan panas tersebut bukan karena persoalan substansi, melainkan mereka tidak tertib dalam menggunakan bahasa serta kurang piawai dalam beretorika.

Penggunaan bahasa yang lugas dan vulgar dalam perdebatan politik, dan diskusi tentang isu-isu yang bersifat kontroversial merupakan tugas yang diemban selaku wakil rakyat. Perdebatan itu merupakan sesuatu yang lumrah dan tetap dihargai. Peluang yang menunjukkan ketidaksantunan dalam mengajukan pertanyaan, permintaan, atau larangan, serta pendapat tidak serta merta dapat



dijadikan kesimpulan untuk tidak santun. Hal itu disebabkan adanya aturan atau kode etik yang wajib dipatuhi sehingga perilaku santun di dalam rapat DPRD tetap terjamin.

Secara sederhana penggunaan bahasa yang tertib dapat ditandai serta direalisasikan lewat kaidah penggunaan alternatif honorifik yang tepat. Selain itu, ketepatan penerapan berbagai kaidah penggunaan satuan lingual dalam praktik komunikasi sering terkait dengan prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan (Leech, 1990).

Anggota legislatif yang merupakan wakil rakyat umumnya memiliki latar sosial budaya, khususnya bahasa ibu atau bahasa pertama mereka yang berbeda-beda. Dampak atas penggunaan bahasa Indonesia para anggota legislatif ketika mereka bersidang dapat memengaruhi cara berbahasa masyarakat yang menyaksikan secara langsung ataupun tidak langsung lewat media sosial. Hal tersebut menarik dan penting untuk dikaji agar dapat merefleksikan cara-cara sebagian orang Indonesia bertutur satu sama lain sesuai dengan kaidah sosial budayanya. Selain itu, itu dapat merefleksikan perkembangan sosial politik.

Berdasarkan hasil pengamatan, ada dua jenis tindak tutur yang dominan digunakan di dalam rapat DPRD yang berpotensi mengancam muka, yakni tindak tutur meminta penjelasan dan tindak tutur memberikan pendapat yang keduanya dapat menekan mitra tutur. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mendeskripsikan dan menjelaskan honorifik dalam tindak permintaan bentuk imperatif sebagai berikut.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Peran Teori Tindak Tutur dalam Memahami Kesantunan Honorifik**

Para pakar bahasa dan pakar komunikasi berpendapat bahwa fungsi utama bahasa adalah sarana komunikasi. Komunikasi melalui bahasa dalam realisasinya melibatkan dua pihak yang berinteraksi, yakni penutur dan mitra tutur. Penutur dan mitra tutur menjalin kerja sama untuk menciptakan makna atau tujuan sosial. Dalam kegiatan interaksi tersebut terlihat adanya upaya penyampaian informasi, perasaan, dan pertukaran ide melalui kerja sama antara penutur dan mitra tutur yang diwujudkan dengan tindak tutur tertentu.

Dalam kajian sosiolinguistik, tindak tutur merupakan proses atau kegiatan berkomunikasi yang melibatkan kemampuan berbahasa penutur. Sehubungan dengan hal itu, Richards (1995: 6—7) menjelaskan bahwa aktivitas bertutur atau berujar merupakan sebuah tindakan. Dengan demikian, semua kegiatan bertutur merupakan tindak tutur. Dalam pandangan tersebut, tindak tutur dapat diartikan sebagai unsur terkecil aktivitas bertutur yang mempunyai fungsi tertentu. Oleh karena itu, bahasa baru memiliki makna setelah dituturkan. Bahasa digunakan oleh penutur dalam situasi tertentu yang memiliki makna. Dalam hal pemaknaan tindak tutur hanya dapat dikenali melalui konteks yang melingkupinya.

Berdasarkan pemahaman makna atau maksud tuturan melalui konteks tersebut, lebih lanjut dapat (1) diungkapkan fungsi (tujuan atau maksud) tindak direktif, (2) diidentifikasi secara jelas wujud tutur atau modus tuturan tindak direktif, dan (3) diidentifikasi secara jelas strategi tutur yang menyatakan tindak direktif secara langsung atau tidak langsung.

Dalam eksistensinya, bahasa yang digunakan sangat erat kaitannya dengan fungsi dan konteks penggunaannya. Hal tersebut meliputi fungsi bahasa di



masyarakat, aspek sosial budaya masyarakat tutur, juga prinsip-prinsip bertutur (prinsip kesantunan dan prinsip kerja sama) yang mengatur proses interaksi antara penutur (Pn) dan petutur (Mt) sehingga proses penyampaian pesan berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, pengguna bahasa selayaknya memperhatikan kaidah-kaidah sosial masyarakat pemakai bahasa itu. Norma-norma sosio-budaya yang mengikat pemakaian bahasa disebut tata krama atau kesantunan bahasa.

Dalam memahami kesantunan (honorifik), Searle mengembangkan teori tindak tuturnya yang terpusat pada ilokusi direktif. Pengembangan jenis tindak tutur tersebut berdasarkan tujuan dari tindak yang didasari maksud Pn, yaitu tindak tutur yang bertujuan untuk menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan Mt. Menurut Leech (1983), meskipun ilokusi direktif menghasilkan efek "menggiring Mt untuk melakukan suatu tindakan", tidak semua direktif bermakna kompetitif sehingga tergolong tindak tutur yang kurang santun. Ada sebagian direktif yang secara intrinsik cukup santun, misalnya, mengundang, tetapi ada pula sebagian direktif yang secara intrinsik kurang santun, misalnya, memerintah dan melarang. Tindak direktif yang berpotensi mengancam muka tersebut, oleh Leech, digolongkan sebagai impositif (*impositive*). Ilokusi jenis ini bersifat kompetitif karena itu membutuhkan kesantunan negatif atau penggunaan alternatif honorifik.

Dari uraian tersebut, tindak tutur sangat berperan untuk memahami budaya suatu masyarakat yang tecermin lewat tuturan (kesantunan honorifik) dalam berinteraksi atau berkomunikasi. Namun, kaitan yang erat antara lahir dan batin tidak mengimplikasikan bahwa tuturan atau ungkapan yang keluar mencerminkan pemikiran atau perasan dari dalam. Tuturan atau kata-kata tersebut tidak selalu jujur, tetapi seharusnya dilakukan untuk menyelamatkan "muka" mitra tutur dan menghindari konotasi pada saat terjadinya interaksi atau komunikasi. Orang bisa saja "berbohong yang pantas" dan juga memberi perintah dengan strategi tak langsung dengan maksud menuruti norma-norma sosial budaya tersebut yang mengatur hubungan antarmanusia dalam hal bagaimana bersikap dan bagaimana bertindak. Dalam hal bersikap dan bertindak inilah, faktor bahasa (tindak tutur) merupakan peran kunci dalam berinteraksi. Jika seseorang sudah dapat melakukan yang baik sesuai dengan norma-norma itu, kesantunan pun dapat terwujud karena dengan berbahasa yang baik hubungan antara penutur dan petutur akan tetap harmonis.

## 2. Kesantunan Honorifik dalam Tindak Tutur Masyarakat Makassar

Penggunaan kesantunan honorifik dalam tindak tutur masyarakat Makassar umumnya masih terikat oleh sistem norma sosial budaya yang dianggap luhur dan suci. Keseluruhan sistem itu disebut *pangngadakkang* (tata krama). Berdasarkan *pangngadakkang* itu, seseorang bersikap, bertingkah laku, dan bertutur kata dengan baik dan santun termasuk ketika berbahasa Indonesia terhadap sesamanya dan terhadap pranata sosial secara timbal balik.

Dalam interaksi komunikasi sosial, partisipan tutur senantiasa dituntut untuk menggunakan bahasa yang santun. Penggunaan bahasa yang santun dalam suatu interaksi sosial bergantung pada batasan-batasan atau prinsip-prinsip yang berlaku atau yang disepakati partisipan tutur pada saat terjadinya komunikasi. Dari pernyataan itu, posisi kesantunan merupakan penghubung antara bahasa dan realitas sosial. Dalam hal ini, kesantunan sebagai bentuk penggunaan bahasa selalu dipasangkan dengan hubungan sosial dan peran sosial. Dengan hubungan sosial dan



peran sosial itulah, pada skala yang lebih besar, kesantunan dihubungkan dengan fenomena-fenomena sosial masyarakat dan kebudayaan. Oleh karena itu, partisipan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kesantunan dalam penggunaan bahasa dalam interaksi sosial agar terjadi hubungan harmonis, terhindar dari konflik, terjadi kerja sama antarpelaku tutur, dan agar komunikasi tetap berlangsung.

Kesantunan yang bersifat honorifik dikemukakan oleh Ide (1982). Teori yang dikemukakan Ide didasarkan pada penelitian terhadap konsep kesantunan Jepang. Dia melihat bahwa pada dasarnya kesantunan terlibat dalam usaha untuk memelihara komunikasi yang lancar. Menurutnya, kearifan tidak bersifat kehendak (*volitional*); ia tidak bergantung pada kehendak bebas penutur, tetapi terdiri atas pilihan-pilihan verbal (gramatikal) yang memiliki kewajiban sosial.

Kesantunan honorifik berkenaan dengan penggunaan ungkapan penghormatan dalam bahasa untuk menyapa orang tertentu. Hal itu tersirat dalam pandangan yang menyatakan bahwa honorifik dalam suatu tuturan biasanya digunakan untuk merendahkan diri dan meninggikan lawan bicara (Anonim, 2007). Mitra tutur akan merasa ditempatkan pada posisi atau statusnya apabila honorifik diterapkan dengan tepat (Eelen, 2001: 13).

Kridalaksana (1985: 14) merinci bentuk sapaan yang digunakan dalam tuturan atas beberapa alternatif, yaitu (1) kata ganti (seperti *aku, engkau, kamu, ia, kita, mereka, beliau*), (2) nama diri (seperti *nama orang yang dipakai untuk semua pelaku*), (3) istilah kekerabatan (seperti *bapak, ibu, saudara, paman, adik*), dalam istilah kekerabatan tidak hanya dipakai terbatas di antara orang-orang yang berkerabat, tetapi juga orang lain, (4) gelar dan pangkat (seperti *dokter, suster, kolonel, jenderal*), (5) bentuk pe + V (verbal) atau kata pelaku (seperti *pembaca, pendengar, penonton, penumpang*), (6) bentuk N (nominal) + ku (seperti *Tuhanku, kekasihku, bangsaku*), (7) kata-kata deiksis atau kata penunjuk (seperti *ini, situ, ini*), (8) nominal (kata benda atau yang dibendakan), seperti *tuan, nyonya, encik*, (9) ciri zero atau nol (misalnya, pada tuturan lisan terdapat bentuk *Mau ke mana?* Kata sapaan dilesapkan, tetapi hal itu tidak memengaruhi pemahaman penutur). Kesembilan kata sapaan itu dapat dikombinasikan (misalnya, *saudara, pembaca, bapak, guru*).

Sumampouw (2000) membedakannya atas delapan jenis sapaan, yaitu (1) istilah kekerabatan, (2) nama diri, (3) nama profesi, (4) julukan (epitet), (5) pronomina persona kedua, (6) kata seru, (7) gelar, (8) pronomina penunjuk tempat.

Sementara itu, Yatim (1983) telah merinci pula sembilan honorifik dalam bahasa Makassar yang lazim digunakan masyarakat Makassar dalam berbahasa Indonesia, yakni (1) penamaan diri, (2) kata ganti, (3) jabatan tradisional, (4) istilah kekerabatan, (5) istilah kebangsawanan, dan (6) jawaban meng-*iya*-kan, (7) menyapa orang kedua sebagai orang ketiga, (8) penggunaan kata ganti milik bersama, (9) variasi respons meng-*iya*-kan (*iyek*).

Bagi masyarakat Makassar, kesantunan honorifik adalah jiwa dalam kehidupan bermasyarakat. Falsafah *sirik* dan *pacce* yang diagungkan oleh masyarakat Makassar adalah dasar terciptanya pernyataan hormat-menghormati sebagai bentuk kebahasaan dalam interaksi sosial.

Berkaitan dengan pernyataan hormat-menghormati, Cliffort Geertz dalam bukunya *The Interpretation of Culture* (Bertens, 2004: 87) mengatakan bahwa *shame culture* adalah kebudayaan di mana pengertian-pengertian, seperti hormat, reputasi, nama baik, status, dan gengsi sangat ditekankan karena memiliki sesuatu





yang positif. Dalam perspektif tersebut, *sirik* sebagai *shame culture* merupakan nilai dalam budaya masyarakat Makassar yang dianggap mempunyai dampak yang positif dalam kehidupan manusia Makassar.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa tuturan imperatif permintaan yang merepresentasikan honorifik. Data yang ditunjukkan oleh penulis dalam artikel ini masing-masing 3 (tiga) data permintaan klarifikasi dan 3 (tiga) permintaan tindakan. Untuk melengkapi pemaknaan data tuturan, peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota legislatif. Sumber data dari anggota Legislatif komisi E, dan D, serta A Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014—2019. Teknik pengumpulan data dengan cara merekam pembicaraan anggota legislatif ketika sedang rapat sidang. Untuk memperoleh data di lapangan, peneliti menggunakan alat perekam (*tape recorder*), kamera, dan alat tulis. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori utama, yakni teori kesantunan berbahasa menurut Brown dan Levinson dengan teknik dasar, yaitu menghitung derajat keterancaman sebuah tindak ujaran dalam berkomunikasi yang banyak ditentukan oleh umur, latar belakang sosial, jenis kelamin, ataupun jarak sosial yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar. Selain itu, digunakan teori menurut Leech, yaitu menyangkut hubungan antara peserta komunikasi, yaitu penutur dan pendengar dengan menggunakan teknik prinsip kesopanan.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk honorifik dalam tindak permintaan umumnya menggunakan BI dengan alternatif bentuk sapaan berupa (1) istilah kekerabatan, (2) kata ganti, dan (3) nama jabatan. Alternatif bentuk honorifik tersebut ada kalanya dikombinasikan dengan alternatif bentuk honorifik lainnya. Bentuk honorifik dalam tuturan permintaan berwujud klarifikasi dan permintaan tindakan sebagaimana berikut.

### Honorifik dalam Permintaan Klarifikasi

[11a] *Kami persilakan dinas sosial menyampaikan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kepesertaan asuransi, khususnya masalah penataan dan keluhan.*

[11b] Ini pekerjaan berat buat sinas sosial. Saya persilahkan dengan hormat.

Konteks: Anggota DPRD meminta dinas sosial memverifikasi semua keterkaitan jenis kepesertaan jaminan kesehatan.

Tuturan imperatif untuk meminta dalam [11a] merupakan pokok pembicaraan dan diikuti oleh berbagai penjelasan seperti pada [11b]. Pokok pembicaraan dalam [11a] menggunakan honorifik *kami*, diikuti kata persilaan dalam [11a dan 11b], serta adanya kata ganti *saya* sehingga terkesan menunjukkan adanya hubungan asimetris, seperti dari bawahan kepada atasan. Namun, dengan adanya nama jabatan, yakni *dinas sosial* untuk menghormati institusi lawan tutur menunjukkan hubungan harmonis, yakni dengan mempertimbangkan aspek sosial dan dimensi sosial lawan tuturnya dan menunjukkan perilaku bijaksana dari anggota legislatif. Selain menunjukkan hubungan harmonis, tuturan anggota legislatif juga sesuai dengan norma sosial masyarakat Makassar, yakni *Siri* dan *Pacce*. Dengan demikian, tuturan permintaan dalam [11a] anggota legislatif tergolong santun.



Contoh lain honorifik dalam tindak permintaan tampak sebagai berikut.

[12a] Tolong, Pak Kadis! Tunjukkan datanya kepada saya karena yang Pak Kadis jelaskan itu masih normatif.

[12b] Diperlukan adanya landasan teori dan penelitian lapangan sehingga peraturan daerah (perda) betul-betul dibutuhkan, Pak Kadis.

Konteks: Anggota legislatif tak ingin hanya penjelasan tanpa disertai dasar pemikiran yang tertuang dalam naskah akademik.

Jika tuturan [11a] menunjukkan hubungan asimetris (seperti dari atasan kepada bawahan), tuturan [12a] menunjukkan hubungan simetris (sejajar) dari anggota legislatif kepada pihak eksekutif (dinas sosial). Dalam tuturan tersebut digunakan modalitas *tolong* yang menunjukkan sikap rendah hati dan honorifik *Pak* dan disertai dengan nama jabatan, yakni *Pak Kadis* untuk menghormati mitra tuturnya sebagai bentuk kemitrasejajaran. Dengan berbagai penanda kesantunan tersebut ditunjukkan bahwa permintaan anggota legislatif walau terkesan tegas, tetap santun sesuai dengan norma sosial budaya masyarakat Makassar.

[13a] Saya kira ada beberapa hal Pak Kadis (kepala dinas) yang perlu diklarifikasi dari saya dan dari Ibu Rusli dan dari teman sekalian (anggota-anggota legislatif).

Konteks: Anggota legislatif dan dinas sosial bertekat membuat ramperda tentang mekanisme ternak sapi. (Imprt/PK/PS/9/37).

Jika tuturan imperatif permintaan pada [11b] tersebut menunjukkan hubungan asimetris, tuturan imperatif permintaan [12a dan 13a] menunjukkan hubungan simetris. Dalam tuturan tersebut digunakan honorifik sapaan *Pak* dan disertai dengan nama jabatan eksekutif, yakni *Kadis* [12a dan 13a], serta sapaan kekerabatan yakni *Ibu Rusli* [13a]. Tampak pula anggota legislatif berusaha memberi pilihan atas tuturan permintaannya, yakni *Saya kira ada beberapa hal ....* Dengan demikian, tuturan permintaan yang menunjukkan penggunaan alternatif honorifik anggota legislatif sangat santun.

Berdasarkan deskripsi data tersebut, dinyatakan bahwa penggunaan honorifik untuk meminta klarifikasi oleh anggota legislatif umumnya dinyatakan seperti dari bawahan terhadap atasan (asimetris). Dengan demikian, umumnya anggota legislatif dalam menyatakan tuturannya dalam rapat sidang tergolong santun atau sesuai dengan norma sosial budaya masyarakat setempat. Berikut ini penggunaan honorifik untuk meminta tindakan dari anggota legislatif kepada pihak eksekutif.

### **Honorifik dalam Permintaan Tindakan**

Berikut adalah data-data tuturan permintaan tindakan dari anggota legislatif yang menggunakan alternatif honorifik. Alternatif tersebut berupa kata sapaan dan kata ganti orang. Permintaan tindakan lebih tegas daripada permintaan klarifikasi. Hal tersebut sebagai berikut.

[14] *Rencana strategis (renstra) Anda mesti saya pegang*. Dipegang oleh Komisi A. Renstra ini pernah kami rekomendasikan untuk disempurnakan. *Oleh karena itu, kami butuh penjelasan dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia*.

Konteks: Tampak Ketua Komisi A kesal setelah mengetahui pihak KPID tidak tahu aturan main dalam perencanaan anggaran.

Tuturan dalam [14] *Rencana strategis Anda mesti saya pegang* merupakan bentuk permintaan anggota legislatif terkesan tegas. Ketegasan tersebut ditandai kata *mesti* yang berarti 'keharusan'. Keharusan tersebut berkaitan dengan hal yang



penting dan didasari niat yang baik serta adanya argumentasi dalam tuturan [14], yakni *Oleh karena itu, kami butuh penjelasan dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia*. Selain itu, tuturan permintaan anggota legislatif menggunakan sapaan *Anda* dan kata ganti *kami* sebagai bentuk honorifik terhadap lawan tuturnya. Dengan demikian, walaupun terkesan tegas, permintaan anggota legislatif tersebut tergolong wajar dan tetap santun sesuai dengan norma sosial budaya masyarakat Makassar.

[15] Terkait dengan data kepesertaan asuransi kesehatan, mungkin bisa kami dapatkan dari BPJS. *Itu kami butuhkan terkait dengan pelayanan yang terjadi di masyarakat*.

Konteks: Anggota legislatif tampak kesal kepada pihak BPJS terkait hak peserta BPJS yang tidak terpenuhi.

Tuturan *Itu kami butuhkan terkait dengan pelayanan yang terjadi di masyarakat* dalam [15] merupakan bentuk permintaan yang mendesak sehingga terkesan tegas. Permintaan tersebut didasari adanya temuan bahwa pihak BPJS kadang kala tidak konsisten memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Namun, dengan adanya penjelasan sebelum tuturan permintaan, yakni *Terkait dengan data kepesertaan asuransi kesehatan ... dan penggunaan honorifik kami* dalam tuturan tersebut sehingga permintaan anggota legislatif terkesan rendah hati dan santun sesuai dengan norma sosial budaya masyarakat Makassar.

[16] Agenda kita hari ini adalah *ekspos* rancangan akademik dan rancangan peraturan daerah (ramperda) perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas (cacat). Ramperda ini adalah ramperda yang tertunda sejak tahun lalu *sehingga harus kita bisa bahas hari ini*.

Konteks: Ketua komisi E membuka acara pertemuan dengan dinas sosial yang dihadiri juga oleh wakil penyandang disabilitas dalam rangka penyediaan infrastruktur di lokasi umum dan ketertiban umum di jalan raya (minta-minta sumbangan).

Tuturan permintaan anggota legislatif dalam [16], yakni *... sehingga harus kita bisa bahas hari ini* terkesan tegas. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan kata *harus* yang tidak memberi pilihan sehingga terkesan tegas. Hal tersebut berkaitan dengan rancangan yang sudah tertunda sejak tahun sebelumnya. Selain itu, dengan digunakannya honorifik *kita* dan adanya penjelasan sebelum tuturan permintaan, itu menunjukkan adanya penghormatan terhadap mitra tutur anggota legislatif sehingga walaupun tegas, tetapi tetap santun.

Berdasarkan deskripsi data tersebut, dinyatakan bahwa penggunaan honorifik untuk meminta tindakan oleh anggota legislatif umumnya dinyatakan secara tegas sehingga seperti disampaikan dari atasan terhadap bawahan (simetris). Ketegasan anggota legislatif berkaitan dengan hal-hal yang penting dan mendesak untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam masyarakat Makassar ketegasan yang berkaitan dengan hal-hal yang penting untuk kepentingan bersama dikategorikan hal yang wajar sehingga tergolong santun.

Honorifik dalam tuturan permintaan anggota legislatif Provinsi Sulawesi Selatan yang dinyatakan dalam bentuk imperatif menggunakan kata ganti orang, nama jabatan, sapaan disertai nama jabatan. Berbagai honorifik tersebut adakalanya dikombinasikan dengan bentuk honorifik lainnya. Misalnya, sapaan *Pak* dikombinasikan dengan nama jabatan, seperti *Pak Kadis* pada [12a], serta sapaan kekerabatan *Ibu Rusli* pada [13a]. Penggunaan berbagai bentuk honorifik dalam



tuturan permintaan anggota legislatif agar mitra tutur nyaman sehingga dapat melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan anggota legislatif.

Temuan dalam hasil penelitian ini menunjukkan hal berikut.

- a) Berbagai honorifik itu dapat disampaikan pada awal, tengah, dan akhir tuturan. Namun, pada data tersebut umumnya honorifik itu digunakan pada awal tuturan. Kalaupun ada honorifik pada akhir tuturan, itu hanyalah penegasan.
- b) Honorifik dalam tuturan permintaan anggota legislatif menggunakan kata ganti orang, nama jabatan, dan sapaan disertai nama jabatan. Pilihan berbagai honorifik tersebut agar tercipta suatu komunikasi yang simpatik dan nyaman. Selain itu, itu dapat menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan sosial yang sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Makassar masih mematuhi norma sosial budayanya.
- c) Penggunaan berbagai alternatif honorifik oleh anggota legislatif didasari oleh faktor kemitrasejajaran dan pengawasan. Kemitrasejajaran mempersyaratkan adanya kerja sama seperti yang tampak pada permintaan klarifikasi. Sementara itu, pengawasan mempersyaratkan adanya sikap kritis terhadap mitra tutur atau pihak eksekutif seperti yang tampak pada permintaan tindakan.
- d) Tuturan permintaan klarifikasi lebih santun daripada tuturan permintaan tindakan yang lebih tegas atau cenderung kurang santun. Hal tersebut disebabkan adanya penggunaan sapaan *Pak* dalam permintaan klarifikasi. Sementara itu, pada permintaan tindakan tidak ditemukan adanya penggunaan sapaan *Pak*.
- e) Anggota legislatif berupaya menyampaikan permintaannya secara lugas dan langsung. Hal tersebut didorong oleh adanya sikap kritis sebagai amanat yang diemban oleh anggota legislatif. Selain itu, dipengaruhi oleh budaya suku Bugis Makassar yang umumnya berkarakter tegas. Dengan demikian, walaupun tuturan permintaannya disampaikan secara lugas dan langsung pada pokok permasalahan, tuturan anggota legislatif tergolong wajar dan berupaya melebihi kelaziman untuk mencapai perilaku santun.

Penggunaan berbagai alternatif honorifik seperti kata ganti orang, sapaan, serta nama jabatan menunjukkan bahwa anggota legislatif melihat dirinya dalam hubungan sosial dengan orang lain. Di dalam ruang rapat, anggota legislatif dengan sengaja memodifikasi tuturannya agar santun. Seperti, a) pada data [11a] kata *kami* menggantikan kata *saya*; b) nama jabatan *dinas sosial* menggantikan kata *Anda* atau *kalian*; dan c) pada data [11b] kata *saya* menggantikan kata *kami*. Berbagai modifikasi pada data [11a] dilakukan oleh anggota legislatif sesuai dengan fungsinya sebagai pengawas sehingga terkesan tegas. Ketegasan permintaan klarifikasi anggota legislatif karena tidak didahului kata sapaan *Pak/Ibu* sesuai dengan kelaziman seperti mempertimbangan usia, status perkawinan, serta jabatan. Namun demikian, karena adanya honorifik *kami* dalam pokok pembicaraan, diikuti pilihan kata *persilakan*, serta penjelasan yang baik pada data [11b], tuturan [11a] tergolong santun.

Hal yang sama terlihat pada data [12a dan 13a] bahwa permintaan klarifikasi anggota legislatif disampaikan secara langsung pada pokok permasalahan dan menggunakan kata ganti *saya* yang seharusnya menggunakan kata ganti *kami* sehingga terkesan tegas seperti dari atasan terhadap bawahan. Namun, dengan adanya berbagai honorifik, misalnya, *Pak Kadis* dan *Ibu Rusli*, dan penjelasan yang



baik pada data [12b], tuturan permintaan klarifikasi anggota legislatif tergolong santun.

Hal berbeda tampak pada permintaan tindakan anggota legislatif pada data [14, 15, dan 16] tersebut. Permintaan tindakan berkaitan dengan hal-hal yang penting dan bersifat mendesak sehingga isi tuturan permintaan anggota legislatif bersifat kompetitif atau bersaing dengan tujuan sosial yang cenderung tidak santun atau terkesan sangat tegas. Seperti pilihan kata *mesti* dan *saya* pada data [14] dan penjelasan yang tegas pada data [15], yakni *Itu kami butuhkan terkait dengan pelayanan yang terjadi di masyarakat* serta kata *harus* pada data [16]. Namun, dengan adanya berbagai alternatif honorifik, kombinasi honorifik dengan nama jabatan, berbagai modalitas yang berfungsi melemahkan isi tuturan permintaan tindakan, serta penjelasan pokok pembicaraan yang baik dan logis tercipta hubungan komunikasi yang harmonis dan santun.

Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa penggunaan modus imperatif dalam tindak tutur langsung untuk meminta klarifikasi dan tindakan terasa tegas terhadap lawan tutur. Kelangsungan tuturan anggota legislatif didasari sikap kritis yang diamanatkan kode etik DPRD. Selain itu, berbicara lugas dan langsung juga didorong adanya kebutuhan untuk mengutamakan efisiensi dalam berkomunikasi. Walaupun ujarannya lugas dan langsung yang berpotensi kurang santun, di dalam rapat anggota dewan berupaya berbahasa dan berperilaku santun.

Temuan tersebut tidak sejalan dengan pendapat Leech (1983: 108) yang mengatakan bahwa makin tuturan itu bersifat langsung makin akan dianggap tidak santunlah tuturan itu. Kesantunan tuturan langsung permintaan anggota legislatif disebabkan anggota legislatif menerapkan skala formalitas Lakoff (1973), yaitu tiap-tiap peserta rapat di ruang sidang saling menjaga keformalitasan dan menjaga jarak yang sewajarnya dan sealamiah mungkin antara pihak legislatif dan pihak eksekutif.

Sementara itu, penggunaan alternatif honorifik anggota DPRD senantiasa dicapai dengan mempertimbangkan lawan tutur dan tujuan tutur. Terhadap lawan tutur, penggunaan alternatif honorifik itu dapat mencerminkan penuturnya bersikap rendah hati, simpati, menunjukkan pujian serta kebersamaan. Sikap-sikap tersebut sejalan dengan skala jarak sosial Leech, (1983: 205--207) bahwa makin jauh jarak hubungan sosial di antara penutur dan mitra tutur makin santunlah tuturan yang digunakan dalam pertuturan itu. Temuan ini juga sejalan dengan skala kesantunan Brown dan Levinson, (1978). Latar belakang sosiokultural seseorang memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan peringkat kesantunan bertutur yang dimilikinya. Orang yang memiliki jabatan tertentu di dalam masyarakat cenderung memiliki peringkat kesantunan lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat biasa (tanpa jabatan).

Terhadap tujuan tutur, permintaan yang diutarakan anggota legislatif dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tertentu serta didasari oleh keinginan yang baik. Dalam hubungan ini berbagai macam bentuk permintaan dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama atau sebaliknya. Berbagai macam maksud dapat diutarakan dengan tuturan yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa anggota legislatif dengan sadar mempertimbangkan penggunaan bahasa agar dapat menjalin hubungan harmonis dengan pihak luar atau lawan tuturnya. Namun demikian, tuturan permintaan anggota legislatif khususnya permintaan tindakan umumnya disampaikan secara langsung pada awal tuturannya. Dengan demikian, itu terasa tegas. Namun, dengan niat dan keinginan yang baik tuturan yang tegas tersebut



dapat dimaklumi oleh lawan tuturnya. Hal tersebut didasari oleh hal-hal yang penting dan bersifat mendesak untuk kepentingan masyarakat.

## **PENUTUP**

Umumnya bentuk honorifik dalam tuturan permintaan klarifikasi dan tindakan masing-masing dinyatakan secara lugas, tegas, tetapi santun. Honorifik tersebut dicapai berdasarkan kemitrasejajaran yang mempersyaratkan kerja sama dan kebersamaan. Sementara itu, ketegasan tuturan anggota legislatif masih wajar untuk mencapai perilaku santun. Hal itu didasari oleh fungsi pengawasan yang mempersyaratkan sikap kritis.

Penggunaan berbagai honorifik dalam tindak meminta klarifikasi dan tindakan lazim digunakan anggota legislatif kepada mitra tuturnya dengan beberapa pertimbangan, yakni perbedaan usia, kedudukan mitra tutur dalam pemerintahan, dan sebagai bentuk kebiasaan bertutur dalam suasana formal.

Berbagai bentuk kesantunan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tutur Makassar umumnya masih terikat oleh sistem norma sosial budaya yang dianggap luhur dan suci. Keseluruhan sistem itu disebut *pangngadakkang* (tata krama). Dengan *Pangngadakkang* itu, seseorang bersikap, bertingkah laku, dan bertutur kata dengan baik dan santun terhadap pranata sosial secara timbal balik.

## **DAFTAR PUATAKA**

- Bertens, K. (2004). *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Brown, G. dan Yule, G. (1996). *Analisis Wacana*. Diterjemahkan oleh I. Soetikno. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Culpeper. (2015). "Impoliteness and Taking Offence in Initial Interactions". *Journal of Pragmatics*. 2015 – Elsevier.
- Eelen. (2001). *Kritik Teori Kesantunan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Facmi, Iwan. (2016). "Ketidaksantunan Berbahasa Indonesia dalam Sidang Paripurna". Skripsi. Universitas Jember.
- Holmes, J. (2001). *An Introduction to Sociolinguistics*. Harlow: Person Education.
- Ide – Lingua. (1982). *Japanese Sociolinguistics Politeness and Women's Language*.
- Ide, Sachiko dalam Eelen. (2001). *Kritik Teori Kesantunan*. Airlangga University Press.
- Misnawati, M. (2017). *Wacana Etnik*. [wacanaetnik.fib.unand.ac.id](http://wacanaetnik.fib.unand.ac.id)
- Kridalaksana, H. (2009). *Dinamika Tutur Sapa dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bhratara.
- Lakoff, R.T. (1989). *Limits of Politeness: Therapeutics and Courtroom Discourse*. *Multilingual* 8: 101—130.
- Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Leech, Geoffrey. (1990). *Principles of Pragmatics*. New York: Longman Group Limited.
- Levinson, P. Brown, S.C. Levinson. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*.
- Maria, Theresia. (2009). "Kesantunan Berbahasa Elit Politik di Media Televisi". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Darma.
- Ramadania, Fajarika. (2016). "Pembentukan Karakter Siswa dengan Memanfaatkan Prinsip Kesantunan pada Tuturan Direktif di Lingkungan



- Sekolah”. *Stilistika Jurnal Bahasa, Sastra, Pengajarannya* ISSN 2527-4104 Vol 1 No.1, 1 April 2016.
- Richard, Jack C. (1995). *On Conversation* (Diterjemahkan oleh Ismari). Surabaya: Airlangga University Press.
- Sitorus, A., & Lubis, M. (2015). “Kesantunan dengan Daya Semiotika Bahasa Berkampanye Calon Legislatif Partai Golongan Karya di Kabupaten Labuhan Batu Utara”.
- Sukri, Muhammad. (2017). “Kesantunan Berbahasa Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Prosiding. FKIP Universitas Mataram.
- Sumampouw, E.W. Silangen. (1990). “Pola Penyapaan dalam Interaksi Verbal dengan Latar Multilingual Studi Kasus Warga Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado”. Disertasi Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yatim, N. (1983). *Subsistem Honorifik Bahasa Makassar: Sebuah Analisis Sosiolinguistik*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yule, George. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.
- (<http://kholidaharras.blogspot.co.id/2009/04/menyoal-kesantunan-berbahasa.html>)



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 1 Kelompok 7**

Pembicara : Syafruddin; Abdul Rahman Rahim  
Judul Makalah : “Honorifik dalam Tuturan Permintaan Anggota Legislatif Daerah di Indonesia”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 08.00—09.30  
Moderator : Toha Machsum, M.Ag.  
Pencatat : 1. Septiamariani  
2. Vita Luthfia Urfa

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Honorifik digunakan dalam tuturan permintaan.
2. Penggunaan honorifik mengkaji tujuan tutur, konteks tutur, kapan, siapa penutur dan mitra tutur, dan bagaimana situasinya.
3. Metode penelitian menggunakan klarifikasi dan permintaan klarifikasi.
4. UU No. 12 Tahun 2008 mengatur tentang perubahan sosial. Kode etik Pasal 45 mengandung norma dan etika.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Leni Yahya  
Instansi : Universitas Andalas

**Pertanyaan:**

Bagaimana cara menerapkan etnografi dalam berbicara kepada anggota dewan yang berlatar belakang berbeda?

**Jawaban:**

Ketidaksantunan muncul karena adanya ketidakselarasan masyarakat setempat dalam berkomunikasi. Terdapat dua cara menghadapi anggota dewan, yaitu dengan normatif dan yuridis. Cara tersebut menggunakan bahasa dengan baik dalam persidangan dan secara ilmiah harus menggunakan honorifik (berusaha merendahkan diri dengan lawan bicara) permohonan. Honorifik berkaitan dengan faktor usia dan siapa yang akan dihadapi. Etnografi komunikasi (cara interpestasi) berkaitan dengan santun dalam berbicara.

**Penanya 2**

Nama : Wisnu  
Instansi : Badan Bahasa

**Pertanyaan:**

Kesantunan berbicara dilihat dari satu arah atau dua arah? Apakah ada kaitan antara fungsi bahasa dan fungsi jabatan?





**Jawaban:**

Kesantunan berbicara harus dua arah dalam konteks formal. Misalnya, seseorang menyapa temannya di sekolah dengan sopan meskipun memiliki hubungan pertemanan.

**Pertanyaan 3**

Nama : Wiratman

Instansi : Surabaya

**Pertanyaan:**

Bagaimana tingkat keberhasilan tuturan sosial dengan jarak dekat atau jauh di masyarakat Makassar?

**Jawaban:**

Makin dekat hubungan dengan seseorang, makin tidak santun tuturannya. Jika tidak ada hubungan, komunikasi terjalin dengan santun. Konteks formal menggunakan honorifik dalam penggunaan bahasa.

**Isu-Isu Penting:**

1. Kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi harus digunakan oleh setiap pejabat negara dan kepada setiap lawan bicara agar terhindar dari hukuman.
2. Sertifikasi ahli bahasa diberikan kepada karyawan Badan Bahasa dan perguruan tinggi untuk menjadi ahli bahasa.



## 8. Pengembangan Fungsi Ragam Bahasa Isyarat Alamiah, Bisindo, sebagai Sarana Pencerdasan Orang Tuli

### PENGEMBANGAN FUNGSI RAGAM BAHASA ISYARAT ALAMIAH, BISINDO, SEBAGAI SARANA PENCERDASAN ORANG TULI

F.X. Rahyono<sup>a</sup> dan Adhika Irlang Suwiryob<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup>Laboratorium Riset Bahasa Isyarat, Departemen Linguistik FIB UI

<sup>a</sup>frahyono.hum@ui.ac.id

<sup>b</sup>adhikairlang@gmail.com

#### Abstrak

Bahasa merupakan satu-satunya instrumen komunikasi yang dapat digunakan manusia untuk mewujudkan keberlangsungan hidupnya. Orang Tuli tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh kemahiran bahasa lisan yang digunakan oleh orang Dengar. Orang Tuli mengandalkan indra penglihatannya untuk memperoleh dan mengembangkan bahasa isyaratnya secara alamiah. Proses pencerdasan orang Tuli tidak berlangsung atau tertunda apabila orang Tuli tidak memperoleh kesempatan menggunakan kemahiran isyaratnya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana bahasa isyarat alamiah diberdayakan sebagai sarana pencerdasan orang Tuli. Bahasa isyarat alamiah merupakan sistem tanda yang melambangkan objek yang dikomunikasikan. Secara semiotis, bahasa isyarat merupakan representamen yang melibatkan proses pemikiran dalam menghasilkan isyarat. Melalui pengamatan lapangan dan perekaman data isyarat, ragam Jakarta dan ragam Yogyakarta, dengan informan Tuli ditemukan keberdayaan bahasa isyarat alamiah sebagai sarana pencerdasan. Orang Tuli mampu mengembangkan sistem pelambangan melalui isyaratnya secara cepat sehingga proses berpikir dalam pengisyratan dan proses berbagi informasi berjalan secara efektif. Kemahiran berbahasa isyarat yang telah dimulai sejak dini menjadikan anak Tuli lebih dini menguasai pengetahuan yang perlu dipelajari serta secara dini memiliki sikap optimisme yang kuat sebagai orang Tuli. Pembelajaran berbahasa isyarat dan pembelajaran berbahasa Indonesia lisan merupakan proses belajar yang selayaknya tidak berjalan secara simultan. Agar proses pencerdasan orang Tuli tidak tertunda, orang Tuli perlu menguasai bahasa isyarat secara alamiah sejak dini sebelum memasuki pendidikan formal di sekolah. Orang Tuli memiliki kesempatan lebih leluasa untuk mempelajari struktur bahasa Indonesia ragam tulis setelah ia mampu menggunakan bahasa isyaratnya secara alamiah.

**Kata-kata kunci:** Bisindo, bahasa isyarat alamiah, kecerdasan, ikonisitas

#### Abstract

*It is important to think that language is the only instrument in bridging communication for the purpose of survival. Deaf people, in the case of language acquirement, might have differ opportunity in acquiring spoken language compared with hearing people. Deaf people rely on their sight in order to process sign language in a natural process. If Deaf people have no access for the accessible language—such as sign language, this could be an obstacle for the brain process which brings to inadequate intelligence. In this paper, the natural sign language is*



*considered as a crucial and prominent vehicle for empowering the Deaf, particularly for being an educated human being. The natural sign language is a system of symbol which represents the object that is communicated. In the field of semiotics, sign language is considered as a represent of the way Deaf people think. In other words, there are processes of thinking in producing sign language and delivering the thought. Based on the observation in the field work as well as sign language documentation, we discover that sign language put its existence as a language that evolved in a natural way which leads to intelligence. Due to their ability in processing the symbol, this is a well-support process in acknowledging the information. Also, this benefit them in the process of thinking in an effective way. If Deaf children are exposed to sign language early—which is concerned as the suitable mode—it is assumed that they will be able to acknowledge what they learn. Also, it is presumed that acquiring sign language since childhood will arouse the positive image of themselves and the characteristic of being optimist as a Deaf person. Based on this argument, learning sign language in the early stage of critical period is prominent before they start school. In this scheme, learning sign language should not be started when they start to enter school. After they acquire their first language (L1), it is more possible for them to learn other subjects, such as written bahasa Indonesia, which becomes their second language.*

**Keywords:** *Bisindo, natural sign language, intelligent, iconicity*

## **PENDAHULUAN**

Kehidupan manusia dapat berjalan secara alamiah apabila segala kebutuhan untuk pertahanan hidupnya terpenuhi. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Peran orang lain tidak dapat dipahami apabila interaksi interpersonal satu orang dengan orang lain tidak terjalin. Jalinan interaksi ini terwujud apabila ada instrumen yang dapat digunakan orang-orang untuk melakukan komunikasi antarsesamanya. Bahasa merupakan instrumen yang digunakan manusia untuk melakukan komunikasi antarsesamanya. Dengan bahasa, setiap orang dapat saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan saling membantu dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya masing-masing. Dengan bahasa, manusia dapat mengembangkan pengetahuan dengan cara mengungkapkan dan memperbincangkan apa yang dipikirkan dan dirasakan dengan orang lain.

Rahyono (2015) menjelaskan bahwa bahasa adalah karya budaya manusia yang digunakan untuk memberikan kemudahan bagi hidup manusia. Dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak pernah lepas dari peran bahasa. Sejak bangun tidur hingga kembali istirahat tidur, manusia tidak dapat lepas dari peran bahasa. Bahkan, dalam mimpi pun manusia menggunakan bahasa sehingga mimpinya dapat berlangsung. Goddard dan Wierzbicka (2014) menyatakan, "*People speak with words, they think with words, they 'do things' with words, to a significant extent, words shape people's lives.*" Sejak manusia dilahirkan, bertumbuh menjadi dewasa, bahasa yang digunakan sebagai instrumen komunikasi pun ikut bertumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan kecerdasan yang dimiliki setiap orang. Kebutuhan hidup yang terus berkembang juga menuntut kemahiran manusia dalam memberdayakan bahasanya. Bahasa membentuk kehidupan manusia.



Bahasa secara alamiah diperoleh manusia sejak dini. Bahkan, sejak manusia dilahirkan, seorang bayi telah menggunakan bahasanya dalam batas tertentu untuk melakukan interaksi dengan alam sekitarnya, termasuk dengan orang-orang yang terlibat dalam proses kelahirannya. Rahyono (2012) menjelaskan bahwa tangisan seorang bayi merupakan perwujudan upaya si bayi untuk menyatakan yang sedang dirasakannya. Si bayi telah mampu berupaya mengatasi keterbatasannya dengan cara menangis. Ia mengungkapkan apa yang dirasakan melalui tangisan. Tangisan seorang bayi merupakan instrumen komunikasi yang digunakan oleh si bayi untuk menyatakan “gagasan” si bayi kepada orang lain.

Selain tangisan, seorang bayi pun menggunakan organ tubuhnya, yakni tangan, jari-jari tangan, raut muka, bahkan kakinya untuk mengungkapkan apa yang sedang dirasakan. Gerakan tangan dan raut muka pun terus berkembang sebagai alat untuk mengomunikasikan perasaan dirinya. Si bayi mulai mampu menggunakan jari-jari tangannya serta raut mukanya untuk mengungkapkan perasaannya dengan gerak yang makin spesifik. Lüke dkk. (2017) menyatakan, “*Even early in their development, infants use pointing gestures to initiate joint attention and to communicate their intentions.*” Fakta tentang pertumbuhan berbahasa pada manusia sejak dini dan pernyataan Lüke itu menunjukkan bahwa bahasa manusia tidak hanya berwujud dalam bentuk rangkaian bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara manusia, tetapi juga oleh gerakan tangan dan jari-jarinya serta ekspresi raut muka yang membangun rangkaian isyarat.

Permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran dan pemelajaran bahasa sejak dini, yakni sejak seorang bayi dilahirkan adalah ketersediaan indra pendengaran seorang anak/bayi yang dilahirkan untuk mendengarkan bunyi-bunyi bahasa dan indra penglihatan untuk melihat gerakan-gerakan tangan, jari-jari, serta ekspresi raut muka orang yang mengajarkan bahasa. Fakta yang ditemukan di masyarakat adalah tidak semua orang sejak lahir dibekali dengan indra pendengaran dan indra penglihatan yang sama. Bagi orang yang dibekali dengan indra pendengaran dan indra penglihatan, anak tersebut sejak dini mampu mengembangkan bahasa lisannya hingga pada taraf “sempurna”. Bagi orang yang tidak dibekali dengan indra pendengaran, indra penglihatan yang dibekalkan pada si anak itu menjadi satu-satunya andalan untuk mengembangkan kemampuan gerak isyaratnya dalam berkomunikasi. Sama halnya dengan anak Dengar, anak Tuli memiliki kecerdasan yang sama untuk mengembangkan bahasa isyaratnya melalui indra penglihatan. Permasalahan yang muncul kemudian adalah adil dan bijakkah orang tua anak Tuli, sebagai orang Dengar, memaksakan kehendaknya agar anaknya yang Tuli juga mampu berbicara seperti layaknya orang Dengar?

Proses pencerdasan manusia, secara alamiah, sudah dimulai sejak dini, tanpa menunggu waktu si bayi berkembang menjadi anak-anak balita. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahasa berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan melalui komunikasi interpersonal dan juga sosial. Berkomunikasi merupakan sarana untuk berbagai pengetahuan yang hasilnya adalah saling mencerdaskan. Apabila tindak komunikasi tertunda, hanya karena si anak tidak memiliki kemampuan untuk mendengar dan mengembangkan bunyi-bunyi bahasa sebagai instrumen komunikasi, proses pencerdasan si anak Tuli pun tertunda. Dengan demikian, apabila kesempatan anak Tuli untuk memperhatikan dan mengembangkan bahasa isyaratnya semenjak dini tidak diberikan, proses pencerdasan si anak Tuli tertunda.



Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Bagaimana bahasa isyarat alamiah dikembangkan dan diberdayakan sebagai sarana pencerdasan orang Tuli? Dalam tulisan ini, bahasa isyarat alamiah yang dibahas adalah Bisindo (bahasa isyarat Indonesia). Untuk merumuskan jawaban permasalahan penelitian ini, sasaran analisis tulisan ini adalah

- 1) menjelaskan prinsip pengisyaratan dalam bahasa isyarat alamiah;
- 2) menjelaskan hubungan antara penggunaan bahasa isyarat alamiah dan proses pencerdasan; dan
- 3) merumuskan strategi pengembangan dan pembinaan bahasa isyarat alamiah.

Penelitian tentang fungsi bahasa isyarat alamiah, Bisindo, yang dikaitkan dengan proses pencerdasan orang Tuli ini merupakan upaya yang maknawi dalam rangka pengembangan dan pembinaan bahasa dalam berbagai ranah kehidupan. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan setiap warga negara. Dalam Pembukaan UUD 45 tertulis, "... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu **pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, ..." Cuplikan teks UUD 45 itu jelas menunjukkan bahwa negara memiliki tugas yang besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk kehidupan orang Tuli. Bisindo, sebagai bahasa isyarat alamiah, adalah salah satu sarana pencerdasan yang tentu saja wajib dikembangkan dan dibina. Tulisan ini merupakan sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa bahasa isyarat alamiah, Bisindo, memiliki peran yang mencerdaskan, meningkatkan semangat, dan menumbuhkan sikap optimisme orang Tuli dalam menjalani kehidupannya seperti halnya orang Dengar.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk melihat dan menunjukkan peran Bisindo dalam kehidupan Tuli. Bahkan, Bisindo merupakan satu modalitas utama yang digunakan oleh seluruh warga, baik Tuli maupun Dengar, di Desa Bengkala, Bali—atau yang lebih dikenal dengan Desa Kolok. Marsaja (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa persentase ketulian yang tinggi di desa tersebut menjadikan bahasa isyarat digunakan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Kesadaran untuk berbahasa isyarat pun tidak memerlukan sebuah dorongan khusus. Melalui Bisindo yang merupakan bahasa dengan modalitas visual-gestural, cara berpikir Tuli pun tergambarkan melalui produk kosakata dan struktur kalimat. Isma (2012) melihat perbedaan struktur kalimat antara Bisindo yang berkembang di Jakarta dan Yogyakarta. Dalam risetnya ditemukan perbedaan dalam level leksikal dan tata bahasa. Perbedaan mendasar yang dapat terlihat dalam konteks tata bahasa adalah terkait dengan *noun referent* untuk subjek dan objek. Pola kalimat yang terbentuk dan diproduksi dipengaruhi *noun referent* yang muncul dalam kalimat tersebut. Sebagai bahasa, Bisindo juga ditilik dari konstruksi pasif yang dihasilkan. Berdasarkan hasil riset awal, terdapat empat bentuk konstruksi yang memiliki padanan dengan konstruksi pasif bahasa Indonesia, yaitu konstruksi dengan verba berarah, konstruksi yang mengedepankan sasaran, konstruksi tanpa pelaku, dan konstruksi pasif semu (Muslim, 2017).

Bentuk *completive aspect sudah* dalam Bisindo—dalam hal ini yang berkembang di Makassar dan Solo—menjadi bahan analisis mendalam untuk melihat kemunculan bentuk penanda tersebut di kedua daerah. Terdapat empat bentuk aspek *sudah* yang ditelaah. Dari hasil riset awal ini didapati bahwa kemunculan aspek ini ada di beberapa posisi, seperti prapredikat, pascapredikat,



akhir klausa, dan klausa dengan bentuk satu isyarat (*one-sign clause*) (Palfreyman, 2014). Kajian sosiolinguistik yang menunjukkan kebermaknaan Bisindo bagi penuturnya juga dituangkan dalam riset tentang bentuk negasi (Palfreyman, 2014). Bentuk negasi yang muncul dalam Bisindo di Makassar dan Solo ini terlihat dengan adanya partikel, klitik, *suppletives*, dan gerakan mulut yang meminjam leksikal dalam bahasa lisan. Makna kalimat dalam bahasa isyarat juga ditandai dengan adanya gerakan mulut pada bentuk leksikal yang diproduksi dalam sebuah kalimat atau ujaran (Suwiryo A. I., 2013). Kemunculan gerakan mulut—terlebih *mouth gesture*—memberikan penekanan makna adverbial dan adjektival sehingga makna gerakan isyarat makin jelas. Kejelasan makna dari sebuah isyarat pun terbangun juga dengan adanya peran *mouthing* yang pada dasarnya merupakan gerakan mulut yang mengadaptasi bentuk pengucapan dari bahasa lisan.

Terdapat variasi lain yang juga ditemukan dalam Bisindo, seperti variasi angka dalam Bisindo yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian awal, adanya variasi angka itu didasari oleh latar belakang geografis dan sekolah seorang Tuli mengenyam pendidikan (Silva Isma, 2017). Frekuensi variasi didapatkan rendah untuk angka 1—5 atau angka-angka yang diproduksi dengan satu tangan. Sebaliknya, frekuensi variasi tinggi untuk isyarat angka yang diproduksi dengan dua tangan. Di samping itu, kajian sosiolinguistik juga mencakup peran Bisindo bagi diri Tuli itu sendiri dalam ranah pendidikan dan pekerjaan (Suwiryo, e.a., 2017). Tidak hanya dalam kedua ranah tersebut, Bisindo turut dipandang sebagai bentuk komunikasi yang paling penting dalam kegiatan interaksi sehari-hari, khususnya dengan keluarga inti.

Penelitian-penelitian tentang Bisindo tersebut memberikan petunjuk tentang peran bahasa isyarat alamiah, Bisindo, sebagai bahasa pengantar komunitas Tuli dalam mengaktualisasikan diri mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tulisan ini fokus pada peran bahasa isyarat sebagai karya budaya Tuli dan sebagai sarana pencerdasan.

## LANDASAN TEORI

Sebagai sebuah karya budaya manusia, bahasa isyarat alamiah merupakan sistem tanda yang melambangkan objek yang dikomunikasikan. Dalam menyajikan teori tentang tanda, Peirce menjelaskan bahwa pemaknaan tanda dimulai dari representamen, yakni tanda yang mewakili objek yang ada dalam pikiran manusia. Peirce memilahkan sistem tanda ke dalam tiga kategori, yakni indeks, ikon, dan simbol (Nöth, 1990; Müller dan Olga Fischer, 2003; Hoed, 2014). Indeks adalah tanda yang menyatakan hubungan kausal antara representamen dan objeknya. Itu adalah tanda yang menyatakan keserupaan antara representamen dan objeknya. Simbol adalah tanda yang maknanya ditentukan berdasarkan konvensi masyarakat penggunaannya. Bahasa isyarat merupakan simbol karena makna representamennya diberikan berdasarkan konvensi sosial. Secara fisis kebahasaan, bahasa isyarat bersifat ikonis, tetapi pengisyratan yang ikonis itu tidak terlepas dengan sifat konvensional dalam praktik berisyarat pada komunitas Tuli. Pengisyratan dalam bahasa isyarat alamiah mengikuti keserupaan objek yang ada dalam kognisi manusia dengan identitas (ciri visual representamennya), yakni objek yang diisyaratkan.

Berdasarkan teori Ogden dan Richards (1923), objek yang ada di dunia nyata dan yang ada dalam pikiran manusia perlu dilambangkan dengan sebuah kata. Teori



Ogden dan Richards ini memberikan petunjuk bahwa kehadiran sebuah kata tidak diperlukan jika benda atau objek yang perlu dimaknakan tidak hadir (Rahyono, 2012: 69). Tidak berbeda dengan bahasa lisan, bahasa isyarat tercipta untuk memberi lambang segala objek dan peristiwa kehidupan sehari-hari yang hadir di pikiran mereka dan perlu dikomunikasikan. Bagi orang Tuli, segala benda yang ada di alam semesta, peristiwa, dan kegiatan hidup manusia yang dihadapi orang Tuli dalam kehidupan sehari-hari dikomunikasikan dengan menggunakan isyarat yang berupa gerak anggota badan, gerak bibir, dan raut muka.

Bahasa merupakan hasil proses kognitif dan pengejawantahan dari apa yang dipelajari dan dipikirkan oleh manusia. Hudson (1990) menjelaskan bahwa dalam berkomunikasi, bahasa berkaitan dengan proses pemikiran dan kebudayaan. Kebudayaan manusia dimiliki melalui proses belajar. Proses belajar melibatkan aktivitas mental yang meliputi *memory* 'ingatan', *inference* 'penyimpulan', *concepts* 'konsep', dan *propositions* 'proposisi'. Dalam bahasa lisan, proposisi merupakan representasi hasil konseptualisasi objek yang ada dalam pikiran manusia dalam wujud rangkaian kata. Berdasarkan konsep teoretis Hudson itu, bahasa isyarat diciptakan berdasarkan hasil konseptualisasi tentang objek atau segala hal yang ada di dunia nyata dan hadir dalam pikiran manusia, yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk gerak isyarat. Bahasa isyarat alamiah merupakan hasil proses kognitif dan pengejawantahan dari apa yang perlu dikomunikasikan dengan kemampuan komunikatif yang berbeda. Proses kognitif dalam berbahasa isyarat tentu juga melibatkan kegiatan pikiran yang dijelaskan di atas. Perbedaannya adalah pada orang Dengar bahwa hasil konseptualisasi tentang segala hal yang ada di dunia nyata direalisasikan dalam bentuk ujaran atau tulisan, sedangkan pada orang Tuli direalisasikan dalam bentuk isyarat gerak anggota tubuh (tangan, jari-jari, dan raut muka).

Salah satu ciri bahasa adalah bervariasi. Sebagai sebuah instrumen komunikasi, bahasa isyarat tidak terhindar dari adanya variasi bahasa isyarat. Sebagai sebuah bahasa, bahasa isyarat alamiah tidak terhindar dari proses pemungutan isyarat dari bahasa isyarat lain. Produktivitas variasi bahasa isyarat, antara lain

- a. terwujud sebagai representasi budaya daerahnya;
- b. terbentuk dari perbedaan wilayah di tempat warga masyarakat bahasa isyarat dilahirkan, dibesarkan, dan berinteraksi antarsesamanya; dan
- c. memenuhi kebutuhan komunikasi dalam situasi formal tertentu yang lintas kelompok atau lintas daerah.

Penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai pulau serta wilayah—yang secara geografis terpisah keadaan alam—menjadikan masyarakat Indonesia membangun kelompok masyarakat yang berbeda. Setiap orang akan lebih sering berkomunikasi dan terlibat dalam tindak komunikasi yang lebih luas dengan orang lain yang berada di lingkungan dekatnya daripada dengan orang yang berada jauh darinya. Dengan demikian, jaringan komunikasi dengan orang yang berada dalam lingkungan yang lebih dekat akan lebih padat daripada jaringan komunikasi yang terjadi dengan orang yang berada di lingkungan yang lebih jauh. Bagi orang Tuli, realisasi bahasa isyarat dalam komunikasi nonverbal, baik dari faktor pengguna bahasa isyarat maupun cara mengisyaratkan segala hal yang dikomunikasikan, tidak seragam. Setiap bahasa memiliki seperangkat varian linguistis (variabel) yang mempunyai distribusi sistematis dan dipahami bersama oleh masyarakat penutur sebagai pemarkah makna sosial tertentu. Dengan demikian, setiap wilayah



menghadirkan bahasa isyarat yang secara konvensional berbeda dari wilayah satu dengan yang lainnya.

## PEMBAHASAN

### 1.1 Prinsip Pengisyaratan dalam Bisindo



Dalam berkomunikasi, partisipan komunikasi menggunakan perangkat kebahasaan yang secara fisik dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, perangkat kebahasaan yang berupa bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara manusia. Kedua, perangkat kebahasaan yang berupa gerakan organ tubuh (gestur), yang antara lain adalah gerakan tangan, anggukan atau gelengan kepala, gerakan pada raut muka. Rahyono (2005: 32) menyatakan bahwa "... wujud fisik bahasa pada dasarnya adalah ciri-ciri fisik bahasa yang dilisankan atau diujarkan." Dalam bahasa isyarat, ciri fisik bahasa isyarat bukan bunyi-bunyi yang diujarkan, melainkan gestur yang diperagakan. Dalam membahas *speech as social interaction*, Hudson (1990) mengategorikan perilaku berbahasa yang menggunakan bunyi-bunyi bahasa sebagai perilaku verbal, sedangkan yang menggunakan gestur sebagai perilaku nonverbal.

Dalam tindak komunikasi yang verbal, bahasa merupakan rangkaian bunyi tuturan terstruktur (tidak acak) yang dihasilkan oleh gerakan alat bicara manusia (aliran udara paru-paru, rongga mulut, pita suara, lidah, bibir). Kemahiran berbahasa pada orang Dengar, yakni para pengguna bahasa lisan, diperoleh dari pengalaman dan penyimakan yang dilakukan dengan menggunakan indra pendengaran. Pada orang Tuli, kemahiran berbahasa nonverbal diperoleh dari pengalaman dan penyimakan yang dilakukan dengan menggunakan indra penglihatan. Bahasa isyarat diciptakan berdasarkan pengalaman dan penyimakan melalui indra penglihatan terhadap rangkaian gerak dan ekspresi raut muka terstruktur yang dilakukan oleh organ tubuh manusia (tangan, telapak tangan, jari-jari, mulut, kepala, mata, wajah).

Bahasa isyarat alamiah, Bisindo, merupakan sistem tanda bahasa yang berupa isyarat yang melambangkan objek atau peristiwa. Jadi, bahasa isyarat alamiah ini diciptakan untuk melambangkan objek atau peristiwa yang perlu dikomunikasikan. Kata *rumah* dalam bahasa Indonesia adalah lambang bunyi bahasa yang menunjuk atau menamai objek yang disebut *rumah*. Isyarat yang melambangkan objek *rumah* diciptakan untuk melambangkan objek yang berupa bangunan tempat tinggal manusia secara langsung, tidak mengisyaratkan kata *rumah* (dalam bahasa Indonesia) atau *house* dalam bahasa Inggris. Dengan kata lain, Bisindo tidak mengisyaratkan kata-kata yang ada dalam bahasa Indonesia yang melambangkan objek *rumah*. Tindakan berpindah tempat dengan melangkahkan kedua kakinya secara bergantian dalam bahasa Indonesia lisan dilambangkan dengan rangkaian bunyi bahasa [berjalan]. Dalam Bisindo, bahasa isyarat tidak mengisyaratkan kata *ber-jalan*, tetapi mengisyaratkan tindakan *berjalan* dalam bentuk rangkaian gerak tangan dan jari mengisyaratkan tindakan *berjalan*. Jadi, Bisindo tidak mengisyaratkan kata-kata yang ada dalam kosakata bahasa Indonesia, tetapi mengisyaratkan segala aspek kehidupan manusia berdasarkan hasil penyimakan indra penglihatan. Ada proses penciptaan isyarat yang meliputi 1) daya ingat terhadap objek atau peristiwa di dunia nyata, 2) proses berpikir, dan 3) pengungkapan dalam wujud isyarat.



Berikut ini bentuk-bentuk isyarat Jakarta dan Yogyakarta yang menunjukkan kealamiahannya dan variasi dalam pengisyaratan yang menunjukkan perbedaan ragam isyarat.

<b>Isyarat Jakarta IBU</b>	<b>Isyarat Yogyakarta IBU</b>
	

Contoh isyarat *ibu* pada isyarat Jakarta adalah menempelkan genggaman tangan ke kepala bagian samping belakang, sedangkan untuk isyarat Yogyakarta menunjuk daun telinga dengan dua jari yang menempel di telinga. Isyarat Jakarta disebarluaskan oleh orang Tuli Jakarta yang dididik di Wonosobo (Jawa Tengah). Yogyakarta yang dekat dengan kota Wonosobo tidak menggunakan isyarat yang sama untuk melambangkan *ibu*. Orang Tuli Yogyakarta menggunakan ciri perempuan yang ditandai dengan penggunaan hiasan pada telinga.

<b>Isyarat Jakarta ISTRI</b>	<b>Isyarat Yogyakarta ISTRI</b>
	

Isyarat untuk melambangkan *istri*, baik isyarat Jakarta maupun isyarat Yogyakarta mengacu pada tindakan antara suami dan istri yang lazim terjadi di kehidupan sehari-hari. Pada isyarat Jakarta, referen yang diisyaratkan adalah kelaziman suami-istri yang bergandengan manakala berjalan bersama. Tangan membentuk posisi menggenggam mengisyaratkan genggaman tangan pasangannya. Pada isyarat Yogyakarta, istri diisyaratkan dengan dua jari yang bergerak menyentuh pipi. Referen yang diisyaratkan dengan dua jari merapat dan menempel ke pipi adalah cium pipi.

---

### Isyarat Jakarta SENIN

---



---

### Isyarat Yogyakarta SENIN

---



Sebuah peristiwa rutin dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi pada hari yang sama, yakni upacara bendera yang diselenggarakan pada setiap hari Senin digunakan oleh Tuli Yogyakarta untuk melambangkan nama hari *Senin*. Pada isyarat Jakarta, nama hari *Senin* dilambangkan dengan dua jari yang rapat dan menempel pada sisi hidung. Jika ditilik dari sejarahnya, siswa Tuli yang bersekolah di sekolah luar biasa untuk Tuli diajarkan untuk mampu berbicara. Teknik dan pendekatan yang digunakan tenaga pengajar untuk mengajarkan siswa Tuli berbicara beragam. Salah satunya adalah memegang hidung agar siswa tahu seperti apa bunyi nasal [n]. Berdasarkan pengamatan, penggunaan isyarat SENIN untuk Tuli di Jakarta melihat pada penggunaan bunyi nasal /n/ yang muncul pada kata *Senin* tersebut. Penelusuran lebih lanjut tentu perlu dilakukan.

Isyarat ikonis, misalnya, isyarat RUMAH untuk Bisindo ragam Jakarta dan Yogyakarta memiliki bentuk tangan yang sama, tetapi dengan gerakan yang berbeda. Isyarat nonikonis yang ada isyaratnya PERNAH (Jakarta dan Yogya: beda), HITAM (Jakarta dan Yogya: beda), SUSAH, IDEOLOGI, dan PRINSIP. Tidak semua hal yang nonikonis ada isyaratnya walaupun Tuli memahami maknanya. Ketika tidak ada isyarat yang dihasilkan, ada kemungkinan bentuk yang muncul adalah *initial-finger spelling* yang diproduksi (hanya menunjukkan abjad jari huruf awal dari kata target) yang didampingi dengan gerakan mulut berdasarkan kata dalam bahasa lisan (*mouthing*), contoh SEPTEMBER, DESEMBER (Jakarta, Yogyakarta). Daerah lain kemungkinan memiliki isyarat yang berbeda.

Produksi kata majemuk dapat diinterpretasikan sama oleh Tuli, tetapi ada perbedaan dalam produksi, seperti *tahun baru*. Tuli Jakarta memproduksi isyarat TAHUN dan BARU, sedangkan pengguna isyarat Yogyakarta memproduksi gerakan seperti meniup trompet. Pemerolehan dan pengetahuan tuli tentang leksikal dan pola kalimat bahasa isyarat tidak seragam. Jika memiliki landasan bahasa pertama yang kuat (bahasa isyarat), seorang Tuli cenderung mampu menunjukkan performa linguistik dengan baik, seperti pada bagian morfologi. Misalnya, dalam produksi SANGAT-ENAK. Bagi mereka yang telah memiliki landasan bahasa pertama (bahasa isyarat) yang kuat, bentuk adverbial dalam ekspresi di atas dapat ditunjukkan melalui *nonmanual feature* (ekspresi wajah). Hal itu tidak dikuasai oleh Tuli yang merupakan *late-learner*.

Proses pemerolehan bahasa, baik untuk bahasa verbal maupun nonverbal berjalan secara alamiah. Pada bahasa lisan, proses pemerolehan bahasa yang secara alamiah ini dapat terjadi tanpa ada kendala apabila orang tua tidak memiliki kendala dalam berbahasa lisan. Pada pemerolehan bahasa isyarat, proses pemerolehan



bahasa isyarat sebagai bahasa pertama terkendala apabila orang tua tidak memiliki kemahiran berisyarat. Bahasa isyarat merupakan bahasa khusus bagi orang Dengar jika mereka tidak berkepentingan menguasai bahasa isyarat. Dengan demikian, orang tua Dengar yang mempunyai anak Tuli menghadapi kendala dalam berkomunikasi dengan anak mereka. Dalam kaitannya dengan pemerolehan bahasa, bahasa lisan menjadi bahasa ibu (bahasa pertama), bahasa kedua, dan bahasa asing. Bahasa isyarat alamiah semestinya menjadi bahasa pertama bagi orang Tuli. Dengan demikian, orang tua anak Tuli *harus* menguasai bahasa isyarat alamiah agar komunikasi dan proses perkembangan kognisi kebahasaan anak Tuli terus berjalan sejak dini.

## 1.2 Proses Pencerdasan dalam Penggunaan Bisindo

Bisindo, bahasa isyarat Indonesia, adalah bahasa isyarat alamiah yang berkembang dengan sendirinya ketika sesama Tuli berinteraksi dan bukan merupakan rekayasa orang Dengar. Bisindo dapat dipahami dan diproduksi secara cepat oleh orang Tuli, menjadi milik bersama, serta berperan secara efektif dan efisien untuk mengatasi keterbatasan dan memfasilitasi keberadaan hidupnya. Kehadiran ragam isyarat kedaerahan yang ditemui di wilayah Indonesia tidak dapat dihindari. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para Tuli dengan cepat memahami isyarat yang berbeda manakala mereka berasal dari daerah yang berbeda dengan ragam isyarat yang berbeda. Bahkan, dalam berkomunikasi dengan Tuli dari negara lain, mereka pun hanya memerlukan waktu yang tidak lama untuk dapat saling memahami.

Laboratorium Riset Bahasa Isyarat (LRBI) Departemen Linguistik FIB UI telah beberapa kali mengundang pakar pengajaran bahasa isyarat dari berbagai negara, yakni Austria, Australia, Thailand, dan Hong Kong. Para peserta Tuli diundang untuk mengikuti pelatihan dasar pengajaran bahasa isyarat dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Yogyakarta, Depok, Banten, Semarang, Palembang, Makassar, Pontianak, dan Denpasar. Para peserta tersebut—mewakili komunitas Tuli di daerah masing-masing—menggunakan ragam isyarat daerahnya masing-masing dan dapat segera berkomunikasi antara satu dan lainnya. Konsep *mutual understanding* yang terdapat di antara pengguna bahasa isyarat memudahkan mereka dalam kegiatan interaksi tanpa perlu memerlukan yang lama untuk mempelajari bahasa asing. Sebagai bentuk antisipasi atas bentuk kosakata yang berbeda untuk sebuah makna, berbagai strategi dilakukan, seperti gestur, ejaan, atau ejaan + *mouthing*. Dalam bahasa lisan, untuk mengikuti pelatihan pengajaran bahasa yang dilatih dengan menggunakan bahasa Cina, misalnya, peserta harus lebih dahulu mengikuti kursus bahasa Cina, misalnya, selama enam bulan. Bagi para Tuli, mereka tidak memerlukan waktu yang panjang untuk saling memahami isyarat dari bahasa atau daerah lain. Mereka secara alamiah mampu memahami dan menggunakan isyarat dari negara atau daerah lain. Konsekuensi dari adanya pertemuan dan interaksi Tuli antardaerah atau antarnegara adalah terpajankannya mereka dengan kaidah-kaidah struktural isyarat asing atau daerah lain tanpa mereka sadari.

Bahasa isyarat alamiah merupakan karya budaya orang Tuli. Rahyono (2015: 48) menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan hasil usaha manusia untuk mengatasi keterbatasan manusia dan memfasilitasi keberadaan hidupnya. Proses penciptaan kebudayaan adalah proses pencerdasan.



Proses penciptaan bahasa isyarat alamiah, Bisindo, yang berkembang dengan sendirinya di antara orang Tuli menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka pencerdasan orang Tuli. Bagaimana bahasa isyarat alamiah relevan dengan pencerdasan orang Tuli? Pengembangan dan penggunaan bahasa isyarat alamiah yang diciptakan sendiri oleh Tuli memicu dan memacu kerja otak untuk menghasilkan karya cipta isyarat sebagai sarana penyelenggaraan hidup orang Tuli. Kerja otak yang berkesinambungan ini merupakan proses 1) pencerdasan orang Tuli, 2) peningkatan sikap percaya diri dan optimisme, dan 3) pengembangan kompetensi diri.

Proses pencerdasan orang Tuli terjadi karena adanya proses empiris yang melibatkan

- 1) daya ingat yang empirik (bukan sekadar menghafal);
- 2) proses berpikir untuk mengklasifikasikan objek dan peristiwa yang dijumpai sehari-hari;
- 3) pengungkapan hasil proses berpikir dalam wujud isyarat;
- 4) pengguna isyarat (orang Tuli dan orang Dengar) untuk mengembangkan *kosaisyarat* dalam Bisindo;
- 5) kreativitas dalam pengisyratan; dan
- 6) pengendalian emosi melalui isyarat.

Pengembangan bahasa isyarat alamiah, Bisindo, dapat memacu produktivitas pengembangan *kosaisyarat* baru yang dihasilkan orang Tuli. Dalam pengembangan *kosaisyarat* ini, terjadi proses pencerdasan pada orang Tuli (sebagai bahasa pertama) dan juga orang Dengar (sebagai bahasa kedua). Seorang anak Tuli yang sejak dilahirkan dan sejak dini diberikan kesempatan untuk mampu berkomunikasi secara alamiah dengan menggunakan isyarat akan memiliki kemampuan untuk memberdayakan dan mengembangkan kemampuannya sejak dini.

### **1.3 Strategi Pengembangan dan Pembinaan Bisindo**

Jika ditilik dari dunia pendidikan, itu dapat dikatakan bahwa tidak sedikit orang Tuli yang mengenyam pendidikan, tetapi tidak menunjukkan performa yang menunjukkan kualitas pemikiran mereka. Dengan pola pendiktean yang masih kental, hal itu berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam mengolah informasi yang diterima. Selain itu, tidak semua Tuli dapat menyampaikan maksud dan pesan mereka dengan baik ataupun kritis. Hal itu terjadi karena bahasa isyarat tidak hadir sebagai sarana pengajaran. Lebih bermasalah lagi apabila peserta didik Tuli tidak dibesarkan oleh keluarga yang menguasai bahasa isyarat. Penyandaran pada bahasa mulut menjadikan proses penyerapan ilmu pengetahuan menjadi lambat. Orang Tuli harus memikirkan dua hal secara simultan, yakni memahami bahasa yang dilisankan melalui gerak mulut dan memahami isi pengetahuan yang dilisankan.

Berdasarkan pengamatan selama ini, banyak Tuli yang dapat mengenyam pendidikan hingga level universitas dengan penjurusan yang mengandalkan visual dalam proses kerja, seperti desain komunikasi visual (DKV). Alasan pemilihan jurusan itu adalah pada materi visual yang banyak digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar. Padahal, tidak semua dari mereka memiliki ketertarikan yang sama. Seiring berjalannya waktu, pihak institusi atau universitas memberikan ruang yang lebih luas bagi Tuli untuk mengenyam pendidikan tinggi. Hal itu terlihat dari bentuk layanan yang diusahakan untuk disediakan bagi calon mahasiswa atau



mahasiswa Tuli. Bentuk layanan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam proses belajar-mengajar. Penyesuaian tersebut disebabkan adanya kebutuhan yang berbeda jika dikaitkan dengan kategori pola komunikasi yang digunakan seperti

- a) pengguna bahasa isyarat;
- b) pemahaman melalui bahasa oral (verbal); dan
- c) pengguna bahasa isyarat dan bahasa oral (verbal).

Pengguna bahasa isyarat yang dimaksudkan di sini biasanya adalah mereka yang tergabung dalam sebuah komunitas tuli—mereka menyadari siapa mereka, peran mereka, dan kontribusi yang dapat mereka berikan.

Kapan *seharusnya* mulai menggunakan bahasa isyarat? Dalam konteks komunikasi antarwarga negara, antarwarga masyarakat, bukan hanya orang Tuli yang menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Seorang bayi yang baru dilahirkan tercipta sendiri bahasanya dalam bentuk tangisan, gerakan tangan, gerakan mulut, dan ekspresi wajah secara spontan dan alamiah. Seiring dengan perkembangan kemampuan fisik, psikis, dan kognitif (penalaran), serta pembelajaran berkomunikasi oleh sang Ibu, bahasa isyarat berkembang menjadi sebuah bahasa yang lengkap.

Secara spontan, orang tua yang selalu berada di samping anaknya yang masih bayi selalu mengajarkannya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang efektif digunakan dalam berkomunikasi dengan seorang bayi. Dalam proses interaksi dan komunikasi antara orang tua dan bayi, khususnya bayi tuli, orang tua dapat menggunakan dua jenis bahasa, yaitu lisan dan bahasa isyarat. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan bahasanya dengan cara melatih cara berartikulasi agar anak dari waktu ke waktu makin mampu melafalkan bunyi-bunyi bahasa yang digunakannya. Selain itu, orang tua juga secara naluriah menggunakan gerak tangan, jari-jari, serta ekspresi raut mukanya sehingga anak juga makin memiliki kemampuan motorik yang sempurna untuk melakukan tindakan komunikatif yang diperlukan. Fakta itu menunjukkan bahwa bahasa lisan dan bahasa isyarat sebenarnya lahir bersama-sama.

Namun, dalam konteks pembelajaran, pembelajaran bahasa Indonesia tidak dilakukan simultan dengan pemerolehan isyaratnya. Bagi orang Tuli, belajar bahasa Indonesia dilakukan melalui tulisan, bukan lisan. Jadi, diperlukan teori dan metode pengajaran yang berbeda dengan yang diajarkan kepada orang Dengar. Jadi, tidak mungkin dipaksakan mempelajari bahasa Indonesia (lisan) secara simultan dan mengisyaratkan bentuk-bentuk morfologisnya. Dua pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama tersebut sangat melelahkan, baik fisik maupun psikisnya. Dengan demikian, orang Tuli perlu diberikan kesempatan untuk berisyarat agar bahasa isyarat berkembang dan mereka pun mampu melambangkan makna yang direpresentasikan melalui bahasa lisan (*spoken language*) yang dalam hal ini adalah bukan bahasa Indonesia morfosintaktis, melainkan semantis dan pragmatis.

Kapan mulai mengajarkan bahasa isyarat? Berbahasa adalah sebuah proses alamiah. Kemampuan berbahasa, baik lisan maupun isyarat seharusnya dikembangkan dan dipersiapkan sejak dini agar anak memiliki kemampuan yang memadai sebelum anak masuk ke pendidikan formal. Dengan demikian, berbahasa isyarat seharusnya dimulai sejak anak Tuli dilahirkan tanpa harus menunggu hingga saat belajar di sekolah.



## PENUTUP

Bahasa isyarat alamiah, Bisindo, tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi. Bahasa isyarat alamiah merupakan ekspresi dan penggerak kehidupan yang membuat manusia hidup dan berkembang dengan kecerdasan dan optimisme untuk menatap masa depan dan menggapai cita-cita. Orang Dengar, termasuk para penentu kebijakan bahasa dan kebudayaan, seyogyanya tidak memaksakan anak-anak untuk membaca tulisan melalui penglihatan apabila ia tidak dibekali dengan indra penglihatan yang berfungsi untuk menyimak tampak wujud tulisan. Untuk kepentingan orang Tuli, seyogyanya tidak dipaksakan anak-anak dapat berbicara atau bernyanyi seperti layaknya orang-orang Dengar apabila ia tidak dibekali dengan indra pendengaran yang berfungsi untuk menyimak suara pembicaraan atau nyanyian. Beri anak-anak Tuli kesempatan untuk meningkatkan kecerdasan, menumbuhkan optimisme, dan mengembangkan diri mereka sesuai dengan anugerah yang diterimanya sebagai orang Tuli, tidak berdasarkan kemauan orang tua atau kemauan orang Dengar. Berkenaan dengan budaya Tuli, Holcomb (2013: 75) menyatakan bahwa “*They want to learn how to feel good about themselves for who they really are and to finally feel that it is okay to be Deaf. They feel relieved that they can stop trying to be hearing, something they are not and never will be.*”

## DAFTAR PUSTAKA

- Goddard, C. dan Wierzbicka, A. (2014). *Words and Meanings*. Oxford: Oxford University Press.
- Hoed, B. H. (2014). *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta: Penerbit Komunitas Bambu.
- Holcomb, T. K. (2013). *Introduction to American Deaf Culture*. Oxford: Oxford University Press.
- Hudson, R. A. (1990). *Sociolinguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Isma, S. T. (2012). *Signing Varieties in Jakarta and Yogyakarta: Dialects or Separate Languages? (Unpublished master's thesis)*. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong.
- Luke, C., Ritterfeld, U., Grimminger, A., Liszkowski, U., dan Rohlfing, a. K. (2017). Development of Pointing Gestures in Children with Typical and Delayed Language Acquisition. *Language and Hearing Research (Online)*, Vol. 60, Iss. 11, 3185—3197.
- Marsaja, I. (2008). *Desa Kolok—A Deaf Village and Its Sign Language in Bali, Indonesia*. The Netherlands: Ishara Press.
- Müller, W. G. dan Olga Fischer, e. (2003). *From Sign to Signing: Iconicity in Language and Literature 3*. Amsterdam: John Benjamin Publishing Company.
- Muslim, M. U. (2017). Pasif dalam Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). *Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Kelima Belas* (hlm. 397—400). Jakarta: Atmajaya University Press.
- Navarrete, E., Peressotti, F., dan Lerose, a. L. (2017). Activation Cascading in Sign Production. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, Vol. 43, No. 2, 302—318.
- Nöth, W. (1990). *Handbook of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press.
- Ogden, C., dan I.A. Richard. (1923). *The Meaning of Meaning*. London: Routledge & Kegan Paul LTD.



- Palfreyman, N. (2014). *Sign Language Varieties of Indonesia: A Linguistic and Sociolinguistic Investigation (Unpublished doctoral's thesis)*. Lancashire: University of Central Lancashire.
- Peirce, C. S. (1931—1958). *Collected Papers*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rahyono, F. (2005). Wujud Fisik Bahasa: Pengantar. In Kushartanti, U. Yuwono, dan M. R. Lauder, *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik* (hlm. 32--46). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahyono, F. (2012). *Studi Makna*. Jakarta: Penaku.
- Rahyono, F. (2015). *Kearifan Budaya dalam Kata, edisi revisi (rev ed.)*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Silva Isma, e. a. (2017). Variasi Isyarat Angka dalam Bahasa Isyarat di Yogyakarta: Sebuah Studi Awal. *Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Kelima Belas* (hlm. 383--387). Jakarta: Atmajaya University Press.
- Suwiryo, A. I. (2013). *Mouth Movement Patterns in Jakarta and Yogyakarta Sign Language: A Preliminary Study (Unpublished master's thesis)*. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong.
- Suwiryo, A. I., e. a. (2017). Perspektif dan Penyesuaian Bahasa oleh Tuli dan Dengar dalam Ranah Keluarga Inti. *Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Kelima Belas*. (hlm. 388—392). Jakarta: Atmajaya University Press.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 3 Kelompok 7**

Pembicara : F.X. Rahyono dan Adhika Irlang Suwiryo

Judul Makalah: “Pengembangan Fungsi Ragam Bahasa Isyarat Alamiah, Bisindo, Sebagai Sarana Pencerdasan Orang Tuli”

Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018

Pukul : 10.15—11.45

Moderator : Toha Machsum, M.Ag.

Pencatat : 1. Septimariani  
2. Vita Luthfia Urfa

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Bahasa dapat diungkapkan dengan menggerakkan jari-jarinya. Orang Tuli mengandalkan indra penglihatannya. Berkomunikasi sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan.
2. Kemampuan komunikasi tertunda karena anak tidak memiliki kemampuan untuk mendengar dan tidak mengembangkan bunyi-bunyi bahasa sebagai instrumen komunikasi sehingga proses pencerdasan anak tuli tertunda.
3. Tugas negara sebagaimana diatur dalam UUD 45 ... mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, negara mempunyai tugas besar untuk mencerdaskan anak bangsa, termasuk anak Tuli.
4. Bahasa isyarat Bisindo memiliki peran mencerdaskan dan meningkatkan semangat anak Tuli.
5. Bahasa isyarat bersifat ikonis.
6. Bahasa isyarat ada yang tidak mengambil dari objek, contoh ada, prinsip, dan ideologi.
7. Orang Tuli yang memiliki perbedaan geografis memiliki cara pandang yang berbeda-beda.
8. Bahasa isyarat mendukung mereka untuk tetap berkembang (pencerdasan).
9. Tuli terlahir 1 : 1.000. Peran keluarga sangat penting untuk anak Tuli mulai dari lahir sehingga anak dan orang tua dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat yang digunakan sehari-hari di rumah. Orang tua dapat mengetahui kondisi anak Tuli dengan bahasa isyarat dalam kondisi apa pun.
10. Bagaimana bahasa isyarat alamiah dapat relevan? Proses pencerdasan orang Tuli terjadi karena adanya proses empiris melibatkan dengan mengungkapkan dengan isyarat, pengendalian emosi melalui bahasa isyarat, pengisyratan secara kreatif.
11. Kapan orang Tuli menggunakan bahasa isyarat? Semenjak bayi lahir menggunakan bahasa isyarat.
12. Bahasa isyarat berkembang menjadi bahasa yang lengkap. Anak memiliki kemampuan motorik dengan menggunakan bahasa isyarat.
13. Bahasa isyarat dikembangkan sejak dini tanpa harus menunggu anak Tuli masuk usia sekolah. Jika menunggu saat sekolah, anak Tuli akan terlambat.
14. Bahasa isyarat alamiah, Bisindo, tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi.





15. Beri kesempatan anak Tuli agar mampu belajar atas kemauan sendiri tidak berdasarkan kemauan orang atau orang tua.
16. Penggunaan bahasa isyarat alamiah sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar.

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Nuni  
Instansi : UPI Bandung

#### **Pertanyaan:**

1. Apakah dalam bahasa isyarat berhubungan dengan budaya atau tidak?
2. Apakah kosakata bahasa isyarat akan selalu bertambah?
3. Pembelajaran bahasa isyarat dapat dilakukan di mana?

#### **Jawaban:**

1. Bahasa isyarat sangat memengaruhi budaya karena letak geografisnya menentukan tradisi yang ada dalam daerah tersebut. Perbedaan budaya tidak memengaruhi antarkomunikasi. Penggunaan bahasa isyarat dapat mencapai kesepakatan antara orang tuli dan juru bicara.
2. Kosakata bahasa isyarat dapat bertambah.
3. Pembelajaran bahasa isyarat terdapat di beberapa tempat. Salah satunya Gerkatina Bandung. Sibi yang digunakan sekolah keliru dan dipaksakan. Anak Tuli diajarkan berbahasa setelah masuk sekolah dan hal tersebut adalah sebuah keterlambatan. Anak Tuli tidak diberi kesempatan mempelajari bahasa ilmiah yang tercetak. Budaya termasuk pencerdasan. Bahasa isyarat digunakan oleh setiap orang sejak dini. Proses pencerdasan dimulai dari bayi. Guru tidak sepenuhnya mengenal SIBI.

#### **Penanya 2**

Nama : Yeni  
Instansi : Pontianak

#### **Pertanyaan:**

Bagaimana cara mengajar anak Tuli yang mengalami kesulitan belajar?

#### **Jawaban:**

Cara mengajar perlu disesuaikan dengan kebutuhannya. Bahasa isyarat bahasa dapat digunakan mulai dari keluarga dan bangun fondasinya agar anak percaya diri. Berikan kesempatan untuk bahasa isyarat agar dapat berkembang.

#### **Penanya 3**

Nama : Ajar  
Instansi : SMALB Madiun

#### **Pertanyaan:**

Apakah ada sebuah kesepakatan dalam pembelajaran untuk menggunakan SIBI atau Bisindo di sekolah?



**Jawaban:**

Kita seharusnya memperjuangkan Bisindo agar dapat dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah sehingga anak didiknya dapat lebih merespons. Agar dapat terwujud, harus ada pemangku kepentingan yang mengakomodasinya.

**Penanya 4**

Nama : Yeni  
Instansi : Pontianak

**Pertanyaan:**

Bagaimana cara mengajar anak Tuli yang mengalami kesulitan belajar?

**Jawaban:**

Cara mengajar perlu disesuaikan dengan kebutuhannya. Bahasa isyarat bahasa dapat digunakan mulai dari keluarga dan bangun fondasinya agar anak percaya diri. Berikan kesempatan untuk bahasa isyarat agar dapat berkembang.

**Penanya 5**

Nama : Ratih  
Instansi : Penerjemah

**Pertanyaan:**

Siapa yang telah menggunakan istilah Bisindo?

**Jawaban:**

Pembuatan kamus bahasa isyarat Indonesia, kamus Bisindo jilid I, bekerja sama dengan UI. Kerja sama tersebut dilakukan UI dengan orang-orang Tuli di daerah untuk menyusun kamus bahasa daerah.

**Isu-Isu Penting:**

1. Badan Bahasa melalui UPT yang berada di daerah bekerja sama untuk membuat bahasa isyarat daerah untuk orang Tuli dengan mengundang juru bicara, orang tuli, dan pemangku kepentingan.
2. Badan Bahasa membuat kamus bahasa isyarat Indonesia untuk memudahkan orang Tuli dalam berkomunikasi dan orang lain. Kosakata yg digunakan orang Tuli dalam berbicara dengan lawan bicara harus memiliki kesepakatan agar maksud dan tujuannya dapat tercapai dan dapat mencapai kesepakatan dalam penggunaannya.



## 9. Implikatur dalam Lirik Lagu yang Dicekal oleh Komisi Penyiaran Indonesia

### IMPLIKATUR DALAM LIRIK LAGU YANG DICEKAL OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)

*Implicature In Song Lyrics*

*Banned or Restricted by The Broadcasting Commission (KPI)*

**Rizki Hidayatullah Nur Hikmat**  
SMAN 3 KABUPATEN TANGERANG  
rnhh23@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi implikatur dalam lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan menggunakan analisis pragmatik. Kerangka analisis pragmatik meliputi analisis implikatur yang digunakan untuk mengkaji lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI. Implikatur dari lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI teridentifikasi melalui analisis terhadap penerapan prinsip kerja sama. Analisis implikatur menunjukkan bahwa tuturan dari lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI melanggar salah satu atau lebih dari prinsip kerja sama. Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa implikatur dalam lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI terealisasi melalui penggunaan gaya bahasa, misalnya, melalui penggunaan metafora dan repetisi. Selanjutnya, fungsi bahasa dalam implikatur lirik lagu dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI pun tereksplorasi. Fungsi representasi yang dominan muncul dari tuturan dalam bentuk lirik lagu dapat mencerminkan pengalaman penutur tentang peristiwa yang telah dialami oleh penutur.

**Kata-kata kunci:** implikatur, lirik, realisasi, fungsi

#### **Abstract**

*This study explores implicatures in the lyrics of the song that was banned or restricted by the Broadcasting Commission of Indonesia (KPI) by using the analysis of pragmatics. Pragmatics analysis framework includes an analysis of the implicatures were used to study the lyrics of the song that was banned or restricted its release by KPI. Implicature of song lyrics that are banned or restricted by KPI identified through analysis of the application of the principle of cooperation. Implicatures analysis shows that the speech is from the lyrics banned or restricted by KPI, violated one or more of the principles of cooperation. It is also revealed in this study implicatures in song lyrics that are banned or restricted by KPI realized through the use of the style of the language, for example, through the use of metaphors and repetition. Furthermore, the function of language in the lyrics was banned or restricted by KPI explored. The function of the dominant representation of emerging from the speech is in the form of the lyrics can reflect the experience of speaking about events that had been experienced by the speakers.*

**Keywords:** implicatures, lyric, realized, function



## PENDAHULUAN

Implikatur merupakan subkajian dari pragmatik. Analisis implikatur sudah populer digunakan dalam penelitian pragmatik sebagai upaya mengungkap maksud yang tersirat dari suatu tuturan. Tuturan yang memunculkan implikatur hendaknya disimpulkan melalui pendekatan inferensi pragmatik. Hal ini sejalan dengan pendapat Grice (1975) dan Cumming (1999) yang intinya berpendapat bahwa suatu tuturan yang memunculkan implikatur perlu disimpulkan melalui inferensi pragmatik agar maksud tuturan itu dapat dipahami oleh mitra tutur.

Dalam praktik berbahasa tidak jarang ditemukan fenomena kebahasaan yang menarik untuk dikaji melalui analisis implikatur, misalnya, lirik lagu. Lirik lagu yang menjadi salah satu bentuk praktik berbahasa menyimpan pesan, baik tersirat maupun tersurat yang dapat dikaji melalui analisis implikatur. Terlebih, saat ini tidak sedikit penggunaan lirik lagu yang berpotensi menimbulkan kesimpangsiuran, keresahan, hingga pencekalan. Kasus pencekalan pernah terjadi terhadap lirik-lirik lagu dalam album *Kamasutra* yang dipopulerkan oleh Julia Perez. Album *Kamasutra* dibatasi peredarannya oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena dinilai mengandung unsur porno seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dari penelusuran literatur, kajian implikatur terhadap lirik lagu memang sudah pernah dilakukan. Akan tetapi, dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian terkait implikatur terhadap lirik lagu hanya terbatas pada satu atau beberapa lirik lagu seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Hikmat (2012 dan 2013), Antonsson (2012), Ochoki dan Schroeder (2012), Hermintoyo (2012), dan Gracyk (2013).

Dari paparan di atas, penelitian ini berupaya melanjutkan dan/atau mengisi celah penelitian yang belum sempat terisi, seperti mengeksplorasi perihal realisasi dan fungsi bahasa dalam implikatur lirik lagu yang belum sempat dieksplorasi oleh penelitian terdahulu. Hal lain yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah data yang digunakan. Dalam penelitian ini, lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI digunakan sebagai data. Pencekalan terjadi karena terdapat sejumlah lirik lagu yang dinilai mengandung konten porno serta melanggar undang-undang pornografi dan undang-undang penyiaran. Hal ini tentunya perlu dibuktikan dengan pendekatan keilmuan sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran serta keresahan dalam masyarakat.

## LANDASAN TEORI

Dalam bagian ini dipaparkan kerangka teori yang melandasi perancangan dan pelaksanaan penelitian. Hal-hal yang akan dijelaskan dalam bagian ini berkaitan dengan implikatur dan inferensi sebagai subbidang kajian pragmatik.

### **Implikatur dalam Kajian Pragmatik**

Keberadaan implikatur dalam suatu peristiwa tutur secara fungsional dapat menjawab keterbatasan pemahaman bahasa yang dikaji secara struktural. Mitra tutur diajak untuk memahami fungsi-fungsi tuturan yang disampaikan penutur secara menyeluruh. Implikatur merupakan wujud produk tuturan dalam perspektif



fungsional yang merepresentasikan maksud dalam percakapan sehingga dapat dikategorikan ke dalam subbidang kajian pragmatik.

Implikatur dapat menjadi penghubung antara apa yang dituturkan oleh penutur dan apa yang menjadi maksud sebuah tuturan yang nantinya diterima oleh mitra tutur. Grice (1975) berpendapat bahwa untuk menyimpulkan implikatur tidak terlepas dari prinsip-prinsip umum dalam pragmatik. Prinsip-prinsip umum tersebut ditandai dengan adanya kerja sama yang konstruktif antara penutur dan mitra tutur dalam suatu peristiwa tutur. Kerja sama yang dimaksud adalah antara penutur dan mitra tutur mengharapkan kontribusi sesuai dengan yang diperlukan dan tingkat penerimaan yang sesuai dengan maksud yang dapat diterima dan disepakati sehingga sejumlah implikasi makna tuturan dapat dipahami oleh mitra tutur.

Grice (1957) menyampaikan bahwa ada lima ciri implikatur konversasi (percakapan). Pertama, dalam keadaan tertentu implikatur percakapan dapat dibatalkan, baik dengan cara eksplisit ataupun dengan cara kontekstual (*cancellable*). Kedua, ketidakterpisahan dengan cara mengatakan sesuatu itu sehingga orang memakai tuturan bermuatan implikatur percakapan untuk menyampaikannya (*nondetachable*). Ketiga, implikatur percakapan mempersyaratkan makna konvensional dari kalimat yang dipakai, tetapi isi implikatur percakapan tidak masuk dalam makna konvensional tuturan tersebut (*nonconventional*). Keempat, kebenaran isi implikatur percakapan tidak bergantung pada apa yang dikatakan (*calculable*). Kelima, implikatur percakapan tidak dapat diberi penjelasan spesifik yang pasti sifatnya.

### **Fungsi Bahasa dalam Implikatur**

Bahasa memiliki fungsi dalam kehidupan. Hal itu membuktikan bahwa bahasa menjadi hal yang pokok dalam kehidupan manusia, begitu pun dengan implikatur. Dalam implikatur juga tersemat fungsi bahasa yang bisa dikategorikan sesuai dengan jenis atau bentuknya.

Beberapa ahli bahasa membagi fungsi bahasa ke dalam beberapa kategori fungsi, misalnya, Leech (2007) membagi fungsi bahasa menjadi lima bagian, yaitu 1) fungsi informasi, 2) fungsi ekspresif, 3) fungsi direktif, 4) fungsi estetis, dan 5) fungsi fatis. Selain itu, Halliday (1973 dalam Tarigan, 2009) menjelaskan bahwa ada tujuh fungsi bahasa sebagai berikut (hlm. 5—7).

- 1) Fungsi instrumental (*the instrumental function*) melayani pengelolaan lingkungan dan menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Dengan kata lain fungsi instrumental adalah bahasa yang berkaitan dengan mengomunikasikan tindak (direktif, orientasi pada mitra tutur).
- 2) Fungsi regulasi, (*the regulatory function*), bertindak untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa-peristiwa. Dengan kata lain fungsi regulasi atau fungsi pengaturan adalah fungsi bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi dan aturan atau berkenaan dengan pengendalian peristiwa (pengendalian perilaku orang lain).
- 3) Fungsi representasi (*the representational function*) adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan. Dengan perkataan lain *menggambarkan* adalah bahasa yang digunakan untuk menjelaskan dunia nyata atau fungsi representasi berkenaan dengan pernyataan, menjelaskan, dan melaporkan (deklaratif, orientasi pada topik).



- 4) Fungsi interaksi (*the interactional function*) bertugas untuk menjamin serta memantapkan ketahanan dan kelangsungan komunikasi sosial. Jadi, fungsi interaksional adalah fungsi yang berkaitan dengan hubungan komunikasi sosial (ekspresif, orientasi pada hubungan penutur dan mitra tutur).
- 5) Fungsi perorangan (*the personal function*) memberi kesempatan kepada seseorang pembicara untuk mengekspresikan perasaan, emosi, pribadi, serta reaksi-reaksinya yang mendalam. Dengan perkataan lain, fungsi personal adalah fungsi yang berkenaan dengan kemungkinan seorang pembicara untuk mengemukakan perasaan, emosi, dan kepribadian (komisif, orientasi pada penutur).
- 6) Fungsi heuristik (*the heuristic function*) melibatkan penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan seluk-beluk lingkungan. Dengan perkataan lain, fungsi heuristik (interpretasi) adalah fungsi bahasa sebagai alat untuk mempelajari sesuatu atau fungsi yang berkaitan dengan perolehan pengetahuan belajar tentang lingkungan.
- 7) Fungsi imajinatif (*the imaginative function*) melayani penciptaan sistem-sistem atau gagasan-gagasan yang bersifat imajinatif. Dengan perkataan lain fungsi imajinatif adalah fungsi yang berkaitan dengan daya cipta imajinatif dan gagasan (pengungkap sistem khayalan dan gagasan).

Dari sekian banyak teori tentang fungsi bahasa yang dikemukakan para ahli, penelitian ini menggunakan teori tentang fungsi bahasa yang digagas oleh Halliday. Penggunaan teori fungsi bahasa yang digagas Halliday dinilai dapat sejalan dengan arah penelitian ini. Teori fungsi bahasa yang digagas Halliday dapat memberikan konsep yang jelas serta spesifik guna mengeksplorasi fungsi bahasa dalam implikatur lirik lagu yang dibatasi peredarannya oleh KPI. Gagasan-gagasan kritis yang kerap disuarakan oleh Halliday, misalnya, lewat teori tentang fungsi bahasa dinilai dapat menjadi payung dalam penelitian ini terlebih dalam mengungkap fungsi bahasa dalam implikatur lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam proses pengumpulan dan penganalisisan datanya. Sudaryanto (1986) memaparkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fakta dan fenomena yang memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret. Dalam pendeskripsian data, data dideskripsikan tanpa mempertimbangkan benar atau salahnya penggunaan bahasa. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudaryanto (1986) bahwa perian yang deskriptif itu tidak mempertimbangkan benar salahnya penggunaan bahasa oleh penutur-penuturnya (hlm. 62). Hal tersebut merupakan ciri utama dari penelitian deskriptif.

Sementara itu, analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena kebahasaan yang tengah diteliti. Oleh sebab itu, analisis kualitatif berfokus pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan sering kali melukiskannya dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka (Mahsun, 2007).



Data penelitian ini bersumber dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik, seperti media massa, internet, serta langsung dari album yang masih beredar. Lirik lagu “Belah Duren”, misalnya, didapat dari album Kamasutra yang dipopulerkan oleh Julia Perez. Selain itu, lirik lagu lainnya, seperti “Apa Aja Boleh”, “Hamil Duluan”, “Pengen dibolongin”, dan “Goyang Kamasutra” didapat dari hasil mengunduh di situs-situs musik di internet.

## PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan hasil analisis terhadap implikatur dalam lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI. Lirik lagu yang berpotensi diinterpretasi sebagai tuturan porno menjadi unit yang akan dianalisis. Paparan pada bab ini mengacu pada permasalahan penelitian yang telah dirumuskan pada Bab I, yaitu (1) jenis serta realisasi kemunculan implikatur dalam lirik lagu yang dicekal KPI dan (2) fungsi bahasa yang terkandung dalam implikatur yang dicekal oleh KPI.

Analisis implikatur dalam lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni implikatur percakapan umum, khusus, dan berskala (Grice, 1975 dan Yule, 1996). Analisis pelanggaran maksim pun dilakukan untuk mengungkap implikatur percakapan dalam lirik lagu yang dicekal oleh KPI. Selanjutnya, realisasi kemunculan implikatur juga akan dieksplorasi dalam bagian ini.

### Implikatur Percakapan Umum dalam Lirik Lagu yang Dicekal KPI

Dalam lirik lagu yang dibatasi peredarannya oleh KPI terdapat sejumlah bentuk tuturan yang berpotensi mengandung implikatur percakapan. Implikatur percakapan (*conversational implicature*) merupakan maksud yang tersirat dalam suatu tuturan (Grice, 1975). Dari data temuan terdapat sejumlah tuturan dalam bentuk lirik lagu yang berpotensi mengandung implikatur percakapan umum. Implikatur percakapan umum merupakan pengungkapan maksud dari sebuah tuturan yang tidak memerlukan latar belakang pengetahuan atau konteks khusus (Yule, 1996). Berikut ini disajikan bentuk dan deskripsi hasil analisis terhadap lirik lagu yang mengandung implikatur umum, seperti dicontohkan pada [4.1] berikut.

[4.1] *Ayo Abang Ayo Digoyang*  
*Mau Jurus Ngebor atau Jurus Patah-patah*  
*Kita Bergoyang Sambil Berdendang*  
*Aduh Nikmatnya Bukan Kepalang...*  
*Goyang Sih Goyang*  
*Jangan Sampai Kepeleset Bang*  
*Kalau Jatuh Pasti Sakit Bang*  
*Makanya Pakai Sutranya Donk*

Tuturan [4.1] merupakan kutipan dari lirik lagu berjudul “Goyang Kamasutra” yang dipopulerkan oleh Julia Perez. Lirik lagu tersebut dibatasi peredarannya oleh KPI karena dinilai dapat diinterpretasi sebagai tuturan porno. Tuturan porno dalam tuturan [4.1] terindikasi dari kemunculan tuturan *mau jurus ngebor atau jurus patah-patah*. Tuturan tersebut berpotensi diinterpretasi sebagai ajakan untuk melakukan hubungan intim. Ajakan dalam berhubungan intim tecermin dari penggunaan kata *ayo* pada larik sebelumnya. Penggunaan kata *ayo* pada tuturan



[4.1] jika bergabung dengan tuturan *digoyang, jurus ngebor, jurus patah-patah*, dan *sutra* dapat mengimplikasikan hal yang mengarah pada aktivitas seks.

Kemunculan tuturan *mau jurus ngebor atau jurus patah-patah* berpotensi diinterpretasi sebagai tawaran untuk berhubungan intim. Penggunaan kata *mau* dalam konteks tuturan tersebut dapat bermakna menawarkan sesuatu dan modalitas yang bermakna pilihan. Kemunculan tuturan *jurus ngebor atau jurus patah-patah* dapat mengimplikasikan variasi dari aktivitas seks. Ajakan untuk berhubungan seks juga tecermin dari penggunaan tuturan *pakai sutranya donk*. Tuturan tersebut berpotensi diinterpretasi sebagai tuturan porno karena penggunaan kata *sutra* yang dapat dimaknai sebagai alat kontrasepsi.

Tuturan lain yang berpotensi memunculkan implikatur percakapan umum juga terdapat dalam tuturan berikut ini.

[4.2] *Minta cium boleh, minta peluk boleh*

*Apa aja boleh, semuanya boleh*

*Minta ini boleh, minta itu boleh*

*Apa aja boleh, semuanya boleh*

Tuturan [4.2] merupakan kutipan dari lirik lagu “Apa Aja Boleh” yang dipopulerkan oleh Della Puspita. Lagu tersebut menceritakan ungkapan rasa sayang seseorang kepada kekasihnya. Kemunculan implikatur percakapan umum dibuktikan dengan adanya pelanggaran terhadap maksim cara pada tuturan [4.2]. Penggunaan tuturan *aku kabulkan permintaanmu yang penting kamu jadi pacarku* dapat menciptakan keambiguan. Keambiguan muncul dari bentuk *kukabulkan permintaanmu* ditambah lagi terdapat penggunaan tuturan *apa aja boleh semuanya boleh* yang juga memunculkan keambiguan. Penggunaan bentuk *semua boleh* berpotensi menimbulkan keambiguan karena belum dapat dijelaskan secara pasti apa saja yang bisa dikabulkan dan apa saja yang dibolehkan. Oleh karena itu, dari tuturan tersebut dapat menyiratkan bahwa apa pun akan diberikan. Hal tersebut dibuktikan dengan kemunculan tuturan *minta cium boleh* dan *minta peluk boleh*. Ditambah penggunaan tuturan *apa aja boleh, semuanya boleh* yang mengisyaratkan apa pun yang diminta akan dikabulkan.

Realisasi implikatur percakapan umum dalam tuturan [4.2] disampaikan lewat penggunaan majas repetisi dan paralelisme. Pengulangan kata *minta* dan *boleh* dalam tuturan *minta cium boleh, minta peluk boleh, apa aja boleh, semuanya boleh* dapat menjadi penegas maksud penutur yang membolehkan apa pun diminta oleh kekasihnya. Hal ini sejalan dengan definisi majas repetisi sebagai salah satu jenis majas penegasan. Repetisi merupakan majas perulangan kata, frasa, atau klausa yang sama dalam suatu kalimat yang berfungsi sebagai penegas maksud (Wijaya, 2012).

Selain itu, terdapat majas paralelisme, yakni pengungkapan tuturan dengan klausa yang sejajar. Penggunaan majas paralelisme dibuktikan dengan kemunculan tuturan *minta ini boleh* dan *minta itu boleh*. Terdapat dua klausa yang sejajar, yakni *minta ini boleh* dan *minta itu boleh*. Penggunaan paralelisme juga dapat mengisyaratkan maksud penutur yang menegaskan apa pun boleh diminta termasuk jika dimintai untuk berhubungan intim. Hal ini sejalan dengan tujuan penggunaan majas paralelisme sebagai majas penegasan.

Lirik lagu “Hamil Dulu” yang dipopulerkan oleh Tuty Wibowo juga terindikasi mengandung implikatur percakapan umum. Lirik lagu ini juga dibatasi peredarannya oleh KPI karena dinilai mengandung konten porno. Konten porno





lahir dari penggunaan lirik-lirik yang dinilai melanggar undang-undang penyiaran. Lirik lagu ini “Hamil Dulu” menceritakan hal yang berkaitan dengan aktivitas intim. Berikut ini kutipan dari lirik lagu “Hamil Dulu” yang dipopulerkan oleh Tutu Wibowo.

[4.3] *awalnya aku cium-ciuman  
akhirnya aku peluk-pelukan  
tak sadar aku dirayu setan  
tak sadar aku ku kebablasan  
ku hamil duluan sudah tiga bulan  
gara-gara pacaran tidurnya berduaan  
ku hamil duluan sudah tiga bulan  
gara-gara pacaran suka gelap-gelapan*

Dalam kajian implikatur, suatu tuturan yang melanggar maksim dapat terindikasi menyimpan implikatur percakapan. Dalam tuturan [4.3] terdapat pelanggaran terhadap maksim cara. Pelanggaran terhadap maksim cara terindikasi dari penggunaan tuturan *ku hamil duluan sudah tiga bulan gara-gara pacaran tidurnya berduaan* dan *ku hamil duluan sudah tiga bulan gara-gara pacaran suka gelap-gelapan*. Penggunaan tuturan tersebut memicu lahirnya ketaksaan. Ketaksaan lahir dari penggunaan kata *hamil*, *tidur*, dan *gelap-gelapan*. Kata *hamil* memiliki arti ‘mengandung yang salah satunya akibat terjadinya hubungan seks’. Akan tetapi, jika seseorang hamil hanya karena tiduran dan gelap-gelapan saja seperti yang tertuang dalam lirik tersebut tentunya dapat memicu lahirnya keambiguan. Beda halnya jika penggunaan kata tiduran dan gelap-gelapan digunakan untuk melambangkan aktivitas seks.

Jika dikaitkan dengan penggunaan kata *cium-ciuman*, *peluk-pelukan*, dan *kebablasan*, penggunaan bentuk *tidur berduaan* dan *gelap-gelapan* dapat mengimplikasi pada aktivitas intim. Hal itu didukung dari penggunaan kata *cium-ciuman* yang lazimnya digunakan untuk menggambarkan situasi atau aktivitas intim. Selain itu, terdapat kata *peluk-pelukan* yang juga dapat mengindikasikan lahirnya kesan intim dalam lirik lagu tersebut. Ditambah keberadaan tuturan *hamil duluan*. Lazimnya, kehamilan seseorang dapat terjadi karena adanya aktivitas seks. Hal ini tergambar dalam lirik lagu “Hamil Dulu”.

Penutur tidak secara jelas menyebutkan adanya aktivitas seks atau intim dalam lirik lagu tersebut. Akan tetapi, maksud tuturan yang menggambarkan adanya aktivitas seks terindikasi dari penggunaan majas satire. Penggunaan gaya bahasa satire dapat digunakan untuk menyindir perilaku, ide, atau gagasan seseorang. Dalam tuturan *ku hamil duluan sudah tiga bulan gara-gara pacaran tidurnya berduaan* digambarkan seseorang yang hamil di luar nikah karena ketika pacaran melakukan hubungan seks. Hal itu juga dapat menjadi sindiran kepada seseorang yang hamil karena melakukan hubungan intim tanpa ikatan pernikahan. Selain itu, terdapat paralelisme dalam tuturan *tak sadar aku dirayu setan tak sadar aku ku kebablasan*, yakni pengulangan kata *tak*, *sadar*, dan *aku*.

### **Implikatur Berskala dalam Lirik Lagu yang Dicekal oleh KPI**

Implikatur berskala merupakan sejumlah implikatur percakapan yang disampaikan atas dasar suatu skala nilai (Yule, 1996). Lagu yang dibatasi



peredarannya oleh KPI karena berpotensi diinterpretasi sebagai tuturan porno terdapat sejumlah implikatur yang dapat dikategorikan sebagai implikatur berskala. Berikut ini disajikan contoh tuturan dalam bentuk lirik lagu yang mengandung implikatur berskala.

[4.4] *semua orang pasti suka belah duren*

Tuturan [4.4] merupakan kutipan dari lirik lagu “Belah Duren” yang dipopulerkan oleh Julia Perez. Lirik lagu “Belah Duren” menginformasikan hal terkait aktivitas *belah duren* yang berpotensi menyatakan aktivitas intim sehingga lagu ini mendapat pencekalan dan dibatasi peredarannya oleh KPI.

Tuturan [4.4] mengandung implikatur berskala yang teridentifikasi dari penggunaan kata *semua*. Kata *semua* secara leksikal mengandung arti ‘seluruh’. Kata *semua* terletak pada satu bentangan skala yang secara umum terdiri atas ‘semua’ – ‘hampir semua’ – ‘sebagian besar’ – ‘beberapa’ – ‘sedikit’ – ‘tidak satu pun’. Penggunaan kata *semua* mengindikasikan bahwa tidak hanya sebagian orang saja yang *pasti suka belah duren*, tetapi juga sebuah totalitas dari anggota sebuah kelompok. Dalam konteks ini, kelompok yang dimaksud adalah kelompok orang atau manusia. Dengan kata lain, tidak ada satu pun anggota dari kelompok manusia yang tidak sesuai dengan klaim yang dibuat, yakni menyukai aktivitas “belah duren” dan bahwa aktivitas tersebut merupakan sesuatu yang bersifat normal atau dapat diterima secara luas. Dengan demikian, penggunaan implikatur berskala yang tecermin dalam kata *semua* di atas berfungsi memperkuat sebuah klaim.

Penggunaan kata *semua* dalam tuturan [4.4] melanggar maksim kualitas. Penggunaan kata *semua* dalam tuturan [4.4] belum dapat divalidasi kebenarannya, terutama jika dikaitkan dengan kemunculan frasa *belah duren*. Pelanggaran terhadap maksim kualitas dapat diuji melalui pertanyaan, “Apakah semua orang suka belah duren?” Dalam kenyataannya, mungkin ada saja orang yang tidak menyukai buah duren atau tidak suka membelah buah duren, kecuali ada maksud lain yang ingin disampaikan penutur.

Realisasi kemunculan implikatur berskala dalam tuturan [4.4] dapat tergambar dari penggunaan gaya bahasa, yakni totum pro parte. Totum pro parte merupakan majas yang mengungkapkan keseluruhan objek padahal yang dimaksud hanya sebagian (Wijaya, 2012). Penggunaan kata *semua* pada tuturan [4.4] dapat mengisyaratkan sebagian orang yang suka dengan “belah duren”. Oleh karena itu, kesan yang dapat diterima dari kemunculan tuturan [4.4], yakni melebih-lebihkan kenyataan sehingga kenyataan tersebut berpotensi tidak masuk akal atau menimbulkan keambiguan.

### **Implikatur Percakapan Khusus dalam Lirik Lagu yang Dicekal KPI**

Implikatur percakapan khusus muncul dari sejumlah lirik lagu yang dibatasi peredarannya oleh KPI, misalnya, dalam lirik lagu, yakni “Belah Duren” dan “Pengen Dibolongin”. Berikut ini merupakan bentuk tuturan dalam lirik lagu “Belah Duren” yang berpotensi memunculkan implikatur percakapan khusus.

[4.5] *makan duren di malam hari paling enak dengan kekasih  
dibelah bang dibelah enak bang silahkan dibelah  
jangan lupa mengunci pintu nanti ada orang yang tau  
semua orang pasti suka belah duren  
apalagi malam pengantin sampai pagi pun yo wis ben*



*yang satu ini durennya luar biasa  
bisa bikin bang gak tahan sampai-sampai ketagihan.*

Terjadi pelanggaran terhadap maksim cara dalam tuturan [4.5]. Salah satu aspek dari maksim cara adalah bahwa dalam bertutur kita direkomendasikan untuk menghindari ambiguitas. Pelanggaran maksim cara pada tuturan [4.5] terjadi karena ambiguitas tuturan. Ambiguitas tuturan terindikasi pada makna belah duren yang tidak kongruen. Secara leksikal bentuk belah duren dapat diartikan sebagai aktivitas membelah (bisa dengan tangan atau alat potong) buah durian. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah awal agar durian tersebut dapat dimakan atau dinikmati karena durian dilapisi kulit yang tebal dan berduri. Pendeknya, durian harus dibelah sebelum seseorang dapat menikmati.

Ketidakkongruenan pada penggunaan frasa *belah duren* di atas terletak pada ambiguitas yang ditimbulkan karena frasa tersebut muncul dalam lingkungan verbal (ko-teks) yang tidak mengindikasikan makna denotatif. Ko-teks tersebut berupa ungkapan “di malam hari”, “paling enak dengan kekasih”, “mengunci pintu”, “nanti ada orang yang tahu”, “malam pengantin”, “sampai pagi”, dan “bikin bang gak tahan”, dan “ketagihan”.

Pertama-tama, ambiguitas bersumber pada ko-teks “di malam hari”. Makan durian sebetulnya dapat dilakukan kapan saja, tetapi konteks waktu memakannya pada malam hari seolah-olah bersifat khusus dan mendapat penekanan tertentu sehingga memerlukan pengetahuan khusus untuk memahaminya. Dengan demikian, pendengar lagu ini pantas curiga bahwa kegiatan “makan duren” seperti dimaksud pada lagu ini bukanlah aktivitas makan durian biasa.

Ko-teks yang makin memperkuat kecurigaan akan adanya makna khusus adalah ungkapan *paling enak dengan kekasih*. Ketika bentuk belah duren disandingkan atau bergabung dengan bentuk *paling enak dengan kekasih, jangan lupa mengunci pintu, malam pengantin, durennya luar biasa, sampai pagi pun yo wis ben, dan bisa bikin bang gak tahan sampai-sampai ketagihan* berpotensi menimbulkan makna khusus di luar makna leksikal sehingga pendengar memerlukan pengetahuan tambahan atau konteks khusus untuk memahami maksud tersebut.

Timbulnya keambiguan dapat dibuktikan dengan menguji tuturan tersebut melalui pertanyaan, “Mengapa makan duren harus pada malam hari?” “Mengapa makan duren paling enak dengan kekasih?” Dalam kenyataannya, kegiatan membelah buah durian dapat dilakukan dengan siapa saja dan kapan saja, tidak perlu ada penekanan dengan kekasih apalagi pada malam hari, kecuali terdapat maksud lain (makna kontekstual) dalam tuturan tersebut.

Kemunculan tuturan *dibelah bang dibelah enak bang silakan dibelah* juga dapat memperkuat maksud khusus yang ingin disampaikan penutur. Tuturan tersebut merupakan bentuk permisif (mempersilakan). Penggunaan bentuk *silakan dibelah* menggambarkan adanya potensi maksud permisif dari tuturan tersebut. Bentuk tersebut jika dikaitkan dengan tuturan lain berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap maksim cara. Akan timbul keambiguan karena bentuk permisif *dibelah bang dibelah* berpotensi dimaknai ganda oleh pendengar. Terdapat bentuk *dibelah* yang secara leksikal bermakna aktivitas membelah (suatu benda). Akan tetapi, benda yang dibelah belum dinyatakan secara tegas dalam larik



tersebut. Hal ini yang menyebabkan tuturan tersebut melahirkan implikatur percakapan.

Lirik lagu berbahasa Jawa berjudul “Pengen Dibolongin” yang dipopulerkan oleh Aan Anisa pun berpotensi mengandung implikatur percakapan khusus. Berikut ini merupakan kutipan dari lirik lagu “Pengen Dibolongin”.

[4.6] *Aduh kakang ana ning endi  
Ora tahan, kula pengen dibolongi*

Implikatur percakapan khusus dalam lagu “Pengen Dibolongin” terindikasi dari penggunaan frasa *pengen dibolongin*. Penggunaan frasa *pengen dibolongin* dalam tuturan [4.6] terindikasi melanggar maksim cara. Pelanggaran maksim cara pada tuturan [4.6] terindikasi dengan munculnya ambiguitas dari penggunaan frasa *pengen dibolongin*. Secara leksikal kata *pengen* berarti ingin dan kata *dibolongin* berarti ‘dilubangi’ atau ‘dibolongi’. Dalam konteks tuturan tersebut penggunaan bentuk *pengen dibolongi* berpotensi memunculkan implikatur percakapan khusus. Kemunculan implikatur percakapan khusus dalam tuturan tersebut didukung dengan kemunculan tuturan *aduh kakang ana ning endi, ora tahan* ‘Aduh Mas (sapaan untuk kakak lelaki dalam bahasa Jawa) ada di mana, sudah tidak tahan’. Ada maksud khusus yang ingin disampaikan oleh penutur dengan menggunakan frasa *pengen dibolongin*.

Penggunaan frasa *pengen dibolongin* jika bergabung dengan tuturan *aduh kakang ana ning endi, ora tahan* dapat menyiratkan maksud tentang hasrat seseorang yang ingin melakukan hubungan intim. Maksud tersebut tergambar dari penggunaan frasa *pengen dibolongin* yang bergabung dengan bentuk tuturan lain, misalnya, *aduh kakang ana ning endi, ora tahan*. Penutur menggunakan majas metafora untuk merepresentasikan implikatur percakapan, yakni menyatakan ingin berhubungan intim yang terefleksikan dari penggunaan frasa *pengen dibolongin*. Penggunaan frasa tersebut dapat menyiratkan strategi penutur dalam mengemas tuturan yang ingin disampaikan agar tidak terkesan vulgar.

### **Fungsi Bahasa dalam Implikatur Lirik Lagu yang Dicekal oleh KPI**

Dari sekian banyak fungsi bahasa, Halliday (2007) menyebutkan tujuh fungsi bahasa, yakni instrumental, regulasi, representasi, interaksi, personal, heuristik, dan imajinatif. Menurut Halliday, tuturan dapat dijadikan (1) instrumen, (2) regulasi, (3) representasi, (4) alat interaksi, (5) personal, (6) heuristik, dan (7) mencerminkan imajinasi penutur.

Fungsi bahasa dalam implikatur lirik lagu yang dicekal oleh KPI didominasi oleh fungsi representatif, disusul oleh fungsi personal, serta instrumental. Fungsi-fungsi bahasa ini terindikasi dalam implikatur lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI. Artinya, bahasa yang digunakan dalam lirik-lirik lagu tersebut berfungsi untuk membuat pernyataan, menyampaikan fakta-fakta, pengetahuan, menjelaskan atau menggambarkan realitas yang sebenarnya, alat untuk mengekspresikan diri, serta mengomunikasikan tindakan (direktif, orientasi pada mitra tutur).

Keberadaan fungsi representasi, personal, dan instrumental dari lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI tergambar dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Fungsi Bahasa dalam Implikatur Lirik Lagu yang Dibatasi Peredarannya oleh KPI**

No.	Judul Lagu	Fungsi Bahasa						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	“Belah Duren”			√		√		
2.	“Apa Aja Boleh”			√				
3.	“Hamil Dulu”	√		√				
4.	“Goyang Kamasutra”	√		√		√		
5.	“Pengen Dibolongin”			√		√		

Dari tabel 1 tergambar pemetaan fungsi bahasa dari lirik di atas. Dalam lirik lagu “Belah Duren”, terdapat penggunaan ungkapan-ungkapan berikut ini: *makan duren di malam hari paling enak dengan kekasih, yang satu ini durennya luar biasa, dan bisa bikin bang gak tahan sampai-sampai ketagihan*. Bentuk-bentuk ungkapan tersebut dapat menyiratkan pengetahuan serta realitas yang dialami oleh penutur (Julia Perez). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lirik lagu “Belah Duren” mengandung fungsi representatif.

Selain fungsi representatif, pengungkapan maksud dalam lagu “Buah Duren” juga menyiratkan fungsi personal. Artinya, bahasa menjadi alat untuk mengekspresikan dirinya, mengungkapkan sesuatu tentang dirinya dan sekaligus tentang hal lain. Fungsi personal tersirat dalam lirik lagu “Belah Duren”. Pengalaman personal tersebut terindikasi dari penggunaan tuturan berikut ini: *makan duren di malam hari paling enak dengan kekasih, yang satu ini durennya luar biasa, dan bisa bikin bang gak tahan sampai-sampai ketagihan*.

Tuturan dalam lirik lagu “Goyang Kamasutra” yang dipopulerkan oleh Jupe mengandung fungsi representasi, personal, dan instrumental. Fungsi representasi dari lirik lagu “Goyang Kamasutra” terindikasi dari penggunaan ungkapan *kalah jatuh pasti sakit bang*. Kemunculan lirik tersebut dapat menggambarkan kemungkinan curahan pengalaman empiris penutur. Penutur berpotensi merepresentasikan pengalaman empirisnya tentang kegiatan yang dimaksud dalam lirik lagu tersebut.

Fungsi personal dalam lirik lagu “Goyang Kamasutra” terindikasi dari kemunculan lirik *aduh nikmatnya bukan kepalang*. Dari kemunculan tuturan tersebut tergambar pernyataan yang diutarakan oleh penutur, yakni penutur menuangkan perasaannya lewat ungkapan “aduh nikmatnya”.

Selain fungsi representasi dan personal, dalam lirik lagu “Goyang Kamasutra” pun terindikasi fungsi instrumental. Fungsi instrumental (*the instrumental function*) berkaitan dengan mengomunikasikan tindak (direktif, orientasi pada mitra tutur). Fungsi instrumental dalam lirik lagu “Goyang Kamasutra” terindikasi dari penggunaan tuturan *jangan lupa pakai sutranya dong*. Kemunculan tuturan tersebut berpotensi mengomunikasikan tindak (direktif), yakni mengimbau kepada mitra tutur untuk menggunakan “sutra”. Tindak komunikasi direktif yang disampaikan penutur (Jupe) sejalan dengan kampanye bebas HIV dan AIDS yang juga dikampanyekan oleh Jupe. Kampanye tersebut ditujukan terutama bagi masyarakat saat melakukan hubungan intim.



## **PENUTUP**

Realisasi implikatur dalam lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI dihadirkan pada bagian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mencakup tiga hal, yakni (1) jenis-jenis implikatur yang terkandung dalam lirik lagu yang dicekal oleh KPI, (2) realisasi implikatur dalam lirik lagu yang dicekal oleh KPI, dan (3) fungsi bahasa yang terkandung dalam implikatur lirik lagu yang dicekal oleh KPI.

Terkait pertanyaan penelitian pertama, ditemukan bahwa implikatur dari tuturan dalam lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI, yakni “Apa Aja Boleh”, “Belah Duren”, “Hamil Dulu”, “Goyang Kamasutra”, dan “Pengen Dibolongin”, ada yang berjenis implikatur percakapan umum, khusus, dan berskala. Implikatur percakapan dalam lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI menggambarkan adanya maksud khusus. Hal itu teridentifikasi melalui analisis terhadap penerapan prinsip kerja sama dan penggunaan tuturan yang dipadukan dengan konteks tuturan.

Terkait pertanyaan penelitian kedua, ditemukan bahwa penggunaan majas (gaya bahasa) menjadi salah satu media guna merealisasikan implikatur. Majas yang dominan muncul, yakni repetisi dan metafora. Kemunculan majas repetisi dapat merepresentasikan penegasan maksud yang ingin disampaikan penutur lewat kata atau istilah yang kerap diulang dalam satu rangkaian lirik. Penegasan maksud yang dikemas menggunakan dalam majas repetisi terindikasi dalam lirik lagu “Apa Aja Boleh”.

Kemunculan majas metafora dalam merealisasikan implikatur dapat menunjukkan strategi penutur dalam membiaskan maksud yang akan disampaikan kepada pendengar atau mitra tutur. Selain itu, hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab juga memengaruhi pemilihan diksi dalam tuturan, misalnya, dalam lirik lagu. Penggunaan metafora dan majas-majas lainnya untuk menyamarkan kesan porno pun dapat menyiratkan hakikat manusia sebagai makhluk yang masih memiliki adab dan memiliki rasa malu.

Terkait pertanyaan penelitian ketiga, ditemukan bahwa fungsi bahasa dalam implikatur lirik lagu yang dibatasi atau dicekal oleh KPI pun terungkap dalam penelitian ini. Dalam implikatur lirik lagu yang dicekal atau dibatasi keberadaannya oleh KPI, fungsi representasi menjadi fungsi bahasa yang dominan muncul, disusul oleh fungsi personal, dan instrumental dari ketujuh fungsi bahasa yang digagas oleh Halliday.

Seluruh lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI memiliki fungsi representasi. Kemunculan fungsi representasi dapat menggambarkan pengalaman penutur tentang suatu hal. Pengalaman penutur yang berkaitan dengan aktivitas intim disampaikan dalam bentuk lirik lagu, misalnya, dalam lirik lagu “Goyang Kamasutra”, “Belah Duren”, “Hamil Dulu”, “Apa Aja Boleh”, dan “Pengen Dibolongin”.

Kemunculan fungsi personal dalam lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI dapat memberi kesempatan kepada penutur untuk mengekspresikan perasaan, emosi, pribadi, serta reaksi-reaksinya yang mendalam. Dengan kata lain, fungsi personal merupakan fungsi yang berkenaan dengan kemungkinan seorang pembicara mengemukakan perasaan, emosi, dan kepribadian (komisif, orientasi pada penutur). Fungsi personal terindikasi dalam lirik lagu “Belah Duren”.



Fungsi instrumental pun terindikasi dalam lirik lagu yang dicekal oleh KPI. Keberadaan fungsi instrumental dapat menggambarkan bahasa yang berkaitan dengan mengomunikasikan tindak (direktif, orientasi pada mitra tutur). Fungsi instrumental terindikasi dalam lirik lagu “Hamil Dulu” dan “Goyang Kamasutra”. Fungsi instrumental dalam lirik lagu tersebut dapat menjadi instrumen dalam mengomunikasikan berbagai hal, misalnya, kampanye HIV dan AIDS serta imbauan untuk menjaga diri agar tidak hamil di luar nikah.

Dalam lirik-lirik lagu tersebut kemunculan implikatur pun dapat menyiratkan strategi penutur dalam upaya mengemas tuturannya agar tidak sembarang orang dapat mengetahui maksud tersembunyi dari tuturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tambahan untuk mengungkap maksud yang tersirat dari tuturan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Antonsson, E. (2012). Understanding the Meaning of English Idiomatic Expressions in Song Lyrics: A Survey Regarding Swedish University Students' Understanding of Idiomatic Expressions in English Song Lyrics.
- Cumming, L. (2007). *Pragmatik: Sebuah Perspektif Multidisipliner* (Diterjemahkan Setiwati, dkk.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gracyk, T. (2013). Meanings of Songs and Meanings of Song Performances. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 71(1), 23—33.
- Grice, H. P. (1975). “Logical And Conversation”. *Syntax And Semantics, Speech Act*, 3. New York: Academic Press.
- Grice, H. P. (1957). Meaning. *Philosophical Review* 66:377--88. Reprinted in Rosenberg and Travis (eds) 1971: 436--44 and Steinberg and Jakobovits (eds) 1971: 53--59. Reprinted in Grice 1986.
- Grice, H. P. (1968). Utterer's Meaning, Sentence Meaning, and Word-Meaning. *Foundations of Language* 4:225--42. Reprinted in Grice 1986.
- Grice, H. P. (1969). Utterer's Meaning and Intentions. *Philosophical Review* 78:147--77. Reprinted in Grice 1986.
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*, ed. by Peter Cole and Jerry L. Morgan, pp. 41--58. New York: Academic Press. Reprinted in Grice 1986.
- Halliday, M.A.K. & Ruqaiya Hasan. (2007). *Cohesion in English*. London: Longman.
- Hermintoyo, M. (2012). “Implikatur dalam Lirik Lagu Indonesia Populer (Suatu Kajian Semiotik-Pragmatik). pp. 24—44. ISSN 0216-535X.
- Hikmat, R. H. N. (2012). “Implikatur dalam Lirik Lagu Mobil Bergoyang”. *Prosiding Setali UPI*. Vol 1. 2012.
- Hikmat, R. H. N. (2013). “Interpretasi Porno melalui Inferensi Pragmatik terhadap Lirik Lagu Dangdut dalam Album Kamasutra yang Dipopulerkan oleh Julia Perez”. *Skripsi. Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS, UPI*.
- Leech, G. (1997). *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. (Terj. Dr. M.D.D. Oka). Jakarta: UI Press.
- Lestari, R. (2009). *Sukses UN Bahasa Indonesia*. Jakarta: Media Pusindo.



- Lestari, Y. M. & Ariyanti, L. (2016). Flouting Maxims in Conversational Implicature in The Ellen Degeneres Talk Show. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*, 4(1).
- Mahsun. (2005). *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: Grafindo.
- Ochoki, B. & Schroeder, H. (2012). The Covert Language in Kenyan Hip Hop Lyrics. *Lodz Papers in Pragmatics*, 8(2), 233--263.
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Wijaya. (2012). *Sosiolinguistik Kajian Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. New York: Oxford University Press.





**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 1 Kelompok 8**

Pembicara : Rizki Hidayatullah Nur Hikmat  
Judul Makalah : “Implikatur dalam Lirik Lagu yang Dicekal oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 08.00—09.30  
Moderator : Dra. Ovi Soviaty Rivay, M.Pd.  
Pencatat : Retno Handayani

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Pencekalan lirik lagu yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didasarkan pada konten porno yang melanggar undang-undang pornografi.
2. KPI menganggap lagu yang dicekal melanggar undang-undang. Pencekalan lagu tidak hanya dilakukan terhadap liriknya, tetapi juga penyanyinya. Ada faktor nonbahasa yang diperlihatkan, yaitu cara bernyanyi, pelafalan, dan penampilan penyanyi.
3. Implikatur kajian pragmatik diterapkan dalam menganalisis data penelitian ini. Ada dugaan bahwa lirik lagu yang dicekal oleh KPI ada makna tersirat. Untuk mengetahui ada makna tersirat, ada ukuran yang digunakan berdasarkan teori Grice dan Leech, yaitu prinsip-prinsip umum (empat maksim). Jika lirik lagu mengandung salah satu dari keempat maksim, dipastikan ada implikatur dalam lirik lagu tersebut.
4. Penyebab pencekalan lagu-lagu adalah sebagai berikut.
  - a. Implikatur percakapan dalam lirik lagu yang dicekal atau dibatasi peredarannya oleh KPI menggambarkan adanya maksud khusus yang mengandung konten negatif.
  - b. Penggunaan majas (gaya bahasa) menjadi salah satu media untuk merealisasikan implikatur. Majas yang dominan muncul adalah repetisi dan metafora. Kemunculan majas repetisi dapat merepresentasikan penegasan maksud yang ingin disampaikan penutur lewat kata atau istilah yang kerap diulang dalam satu rangkaian lirik.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Muhammad  
Instansi : UPI

**Pertanyaan:**

Ketika KPI akan mencekal lagu-lagu yang terindikasi pornografi, apa parameternya? Karena beberapa lirik lagu dari Rhoma Irama bisa jadi juga mengandung pornografi. Bagaimana tanggapan, Mas?



**Jawaban:**

Saya ingin menantang KPI mengapa lagu-lagu tersebut dicekal, parameternya apa? Dari mana muncul pornonya? Saya coba berikan gambaran dan landasan. Mungkinkah KPI mencekal dengan adanya dasar keilmuan. Apa hanya menggunakan nalar saja? KPI menggunakan pisau apa untuk menentukan lirik lagu-lagu tersebut mengandung konten negatif?

**Penanya 2**

Nama : Suparno

Instansi : Mantan Kepala Balai Bahasa Jawa Timur

**Tanggapan:**

Parameter penggunaan bahasa yang linear dan umum. Parameter Grice adalah parameter komunikasi wajar, sedangkan lagu bisa saja berparameter majas. Ada perbedaan parameter untuk menganalisis data. Saya agak khawatir, semua bisa diukur dari parameter yang tidak tepat dari sisi tertentu.

**Penanya 3**

Nama : Maliudin

Instansi : Universitas Haluoleo Kendari

**Pertanyaan:**

Lirik lagu butuh parameter yang jelas, layak atau tidak, cekat atau tidak. Saya baru mempunyai anak, kekhawatiran saya sebagai orang tua bahwa bahan komunikasi dalam lagu akan merusak pikiran anak, saya setuju KPI perlu mencekalnya. Orang tua khawatir dengan lirik-lirik lagu tersebut. Apapun caranya, pihak tertentu akan lebih mencari keuntungan daripada efek di kemudian hari terhadap anak-anak.

**Jawaban:**

KPI punya kapasitas dan kapabilitas sendiri. Lagu bisa diakses di mana pun dan kapan pun. Parameternya ini menjadi pertanyaan. Secara *gamblang* pun, sudah terasa aura negatif dari lirik lagu yang dicekal. Parameter menggelitik kita sebagai peneliti.

**Isu-Isu Penting:**

Penyeleksian siaran yang dilakukan oleh KPI perlu memperhatikan konten bahasa, termasuk lirik lagu. Memang ada baiknya pencekalan lirik lagu yang berkonten porno atau negatif dilakukan untuk menjaga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mengungkapkan kesantunan dan tidak dapat dikikis dari bahasa yang dapat mencemari pikiran, khususnya untuk masa depan anak-anak yang mendengar lirik lagu tertentu.





## **E. SUBTEMA 5: PEMANFAATAN BAHASA DAN SAstra SEBAGAI PEREKAT KEBINEKAAAN UNTUK INDUSTRI KREATIF, PARIWISATA, DAN KEARIFAN LINGKUNGAN**

### **1. Pemanfaatan Bahasa dan Sastra sebagai Perekat Kebinekaan untuk Industri Kreatif, Pariwisata, dan Kearifan Lingkungan**

Judul : Pemanfaatan Bahasa dan Sastra sebagai Perekat Kebinekaan untuk Industri Kreatif, Pariwisata, dan Kearifan Lingkungan  
Pembicara : Ricky Joseph Pesik  
Jabatan : Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif  
Hari, Tanggal: Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 14.15—15.15  
Moderator : Dr. Fairul Zabadi

Autorisasi di bidang ekonomi kreatif membentuk sebuah model ekosistem agar pengembangan nilai ekonomi dari sektor kreatif nasional bisa terakselerasi dengan cepat. Hingga saat ini di dalam Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) ada enam fungsi. Enam fungsi ke deputian dalam struktur organisasi itu mencerminkan ekosistem ideal yang ingin dibentuk oleh Bekraf bagi enam belas subsektor ekonomi kreatif yang ada saat ini. Keenam fungsi ke deputian itu adalah riset, edukasi, dan pengembangan, fungsi akses permodalan, fungsi infrastruktur, fungsi pemasaran, fungsi fasilitasi hak kekayaan intelektual dan harmonisasi regulasi, serta fungsi hubungan antar lembaga dan wilayah. Jadi, atas dasar enam fungsi itulah ekosistem ekonomi kreatif pada masa depan akan dibentuk.

*Nah*, dalam keterkaitannya dengan bahasa, semua tugas Bekraf itu menarik karena sesungguhnya kedudukan Bekraf dalam ekosistem itu berada di hilir. Jadi, kita tidak berada di hulu, sebenarnya. Kalau melihat tugas utamanya, Bekraf itu sebenarnya bertugas untuk menunggu di hilir dan mengapitalisasikan untuk kepentingan ekonomi. Sebenarnya, semua sektor pengembangan ekonomi kreatif pada umumnya berlandaskan bahasa Indonesia, bahasa kita. Akan tetapi, yang menjadi tugas utama Bekraf adalah produk akhir dengan bahasa sebagai alat utamanya. Salah satu tugas utama itu adalah sektor penerbitan. Jadi, saat ini Bekraf mendukung pengembangan sektor penerbitan dengan sangat intensif. Contohnya, dua tahun terakhir ini kami mendukung Ikatan Penerbit Indonesia untuk menyelenggarakan *Indonesia International Book Fair* yang diselenggarakan di JCC. Kemudian, dukungan Bekraf makin pesat pada tahun 2019, yaitu dengan membentuk sebuah kepanitiaan pada awal tahun ini setelah Indonesia menandatangani kontrak dengan penyelenggara *London Book Fair*. *London Book Fair* adalah pasar *b to b* atau *bisnis to bisnis*, penerbitan terbesar di dunia khusus untuk buku berbahasa Inggris. Selain itu, Ada pameran buku yang lebih besar, yaitu *Frank Cox Booklet* yang tidak dikhususkan untuk buku berbahasa Inggris, ya. Indonesia pada tahun 2019 akan menjadi *market focus country* dari *London Book Fair*. Oleh karena itu, Bekraf secara besar-besaran bersama dengan Kemendikbud akan mendukung sejumlah karya literatur Indonesia untuk dipasarkan di *London Book Fair* ini. Jadi, itu bagian dari yang saya sebutkan sekilas tadi, yaitu bagaimana Bekraf mengambil posisi mengembangkan di posisi hilir dari semua industri ini. *Nah*, itu salah satu contohnya.



Yang kedua, yang lebih besar lagi adalah subsektor ekonomi kreatif yang kita lihat sekarang. Sebenarnya, tugas utama kita adalah memanfaatkan sebesar-besarnya potensi untuk mengembangkan konten atau bahan. Konten berasal dari bangsa kita sendiri yang bisa memberikan kemanfaatan ekonomi lebih luas ke depannya. Kita ambil contoh, *ya*, film, musik, itu semua bahannya konten, *ya*, dan asalnya memang selalu terkait dengan bahasa Indonesia, pasti, untuk bisa menjadi produk yang bernilai ekonomi lebih baik lagi ke depannya. Jadi, kira-kira memang Badan Ekonomi Kreatif ini banyak bergerak di wilayah hilir dari pengembangan setiap sektor ini sehingga kalau dilihat dan dikaitkan dengan bahasa Indonesia justru di situ.

Akan tetapi, di sisi lain Badan Ekonomi Kreatif juga banyak membantu beberapa tugas atau beberapa kerja Pemerintah Pusat yang tidak ada kaitan langsung dengan tugas dan fungsi utama dari Badan Ekonomi Kreatif dari Bekraf untuk mengembangkan enam belas sektor ini. Saya ambil salah satu contoh, sejak ada Bekraf, Sekretariat Negara itu bekerja sama dengan Bekraf untuk menyusun narasi dan simbol utama dari perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun dan melakukannya dengan cara yang profesional. Jadi, Bekraf menggandeng asosiasi yang terdiri atas para profesional bidang desain komunikasi visual, bidang bahasa, dan bidang strategi untuk membantu Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Negara untuk merancang dan membuatkan sebuah tema atau pesan yang lebih kuat tentang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, sudah sejak HUT Ke-70 RI, Hari Ulang Tahun Ke-70 Republik Indonesia, tema perayaan dibuat oleh Bekraf, termasuk yang terakhir, yang ke-73, temanya “Kerja Kita Prestasi Bangsa” karena dikaitkan dengan posisi kita yang menjadi tuan rumah Asian Games.

Kita juga membantu beberapa lembaga pemerintah lain untuk menampilkan citra Indonesia yang lebih baik, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional. *Nah*, tentunya ini tidak terkait dengan bahasa Indonesia, tetapi saya ambil contoh bahwa Bekraf-lah yang membantu Kementerian Pemuda dan Olahraga ketika menetapkan pesan utama saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games XVIII kemarin. Jadi, waktu itu kita membentuk tim untuk membantu Kemenpora merumuskan bahwa Indonesia harus menyampaikan pesan seperti apa dalam bahasa. Namun, karena ini *event* internasional, pesan tidak disampaikan dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris. Tentunya Bapak-Bapak/Ibu-Ibu pasti ingat tema Asian Games yang dipakai kemarin, *ya*, “*Energy of Asia*”. Itu hasil bantuan dan rumusan yang dilakukan oleh tim profesional yang diarahkan oleh Bekraf untuk Kemenpora dan Inasgoc, termasuk logo dan maskotnya, *ya*, dan turunannya. Ada juga beberapa aspek yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bahasa Indonesia dan pengembangan ekonomi kreatif nasional yang menjadi apa keprihatinan. Sebagai contoh, saat ini Bekraf sedang mencoba bicara dengan duduk bersama dan merumuskan dengan Kementerian Keuangan, terutama Badan Kebijakan Fiskal tentang insentif bagi para penulis Indonesia. Jadi, bagi para penulis kita, kalau kita mau mengembangkan literasi nasional, tentunya harus ada insentif. Semua negara melakukan itu. Keluhan para penulis Indonesia konon mengalami hal tertentu. Mungkin di antara Bapak-Bapak/Ibu-Ibu ini ada yang penulis juga, *ya*? Pajak yang harus dibayarkan oleh para penulis Indonesia itu termasuk paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain dan ini sebuah kondisi yang tidak sehat



kalau kita mau memajukan literasi nasional. Kita harus memberikan insentif. Industri kreatif itu pada dasarnya adalah kompetisi tiap-tiap negara, tiap-tiap pemerintah dalam memberikan insentif kepada para pelakunya supaya bisa tumbuh berkembang lebih cepat dan itu yang sedang digarap sekarang oleh Bekraf dengan konsultan Kemenkeu untuk membuat rumusan baru agar pajak itu lebih kompetitif.

Yang kedua tentunya dalam penggunaan bahasa. Yang saya tahu adalah saya suka menonton film Indonesia, bahkan sebelum saya duduk di Bekraf pun saya suka sekali menonton film Indonesia. Segala macam film, saya tonton. Namun, saya akhir-akhir ini melihat, mungkin, saya tidak tahu ini asal-muasalnya dari mana. Dari sepuluh judul film Indonesia, kalau kita lihat, hampir separuhnya berbahasa Inggris. *Nah*, kalau kita lacak mundur, kalau film itu asalnya dari novel, rata-rata karena katanya tujuh dari sepuluh film Indonesia itu asalnya dari novel. *Nah*, ini berarti judul novelnya, *ya*, judul novel yang beredar di pasar penerbitan kita terutama novel-novel kontemporer itu ternyata judulnya berbahasa Inggris. Judulnya, bukan ceritanya. Jadi, saya tidak tahu dari mana asal- muasalnya, tentunya pasti ada sebuah persoalan besar di generasi milenial kita yang kebanyakan, rata-rata menjadi pelaku utama, baik di penerbitan maupun perfilman, bahwa bahasa Indonesia itu makin tidak menjadi bahasa utama mereka dalam cara berpikir mereka ketika mereka melakukan sebuah tulisan atautkah memang hanya sekadar kelihatan supaya kelihatan *keren-kerenan* saja karena di era informasi yang tanpa batas ini kita terpapar dengan bahasa itu, terutama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu apa, *ya*, *berkelilitan* tiada henti, *gitu kan?* Jadi, mungkin generasi milenial ini juga sudah sulit memahami batas antara bahasa sendiri, yang penting komunikatif. Sering kali begitu. Dengan dengan alasan seperti itulah kemudian bahasa itu bisa ditempatkan seenak jidatnya. Dipakai seenaknya *aja*, *gitu kan*. Yang penting, katanya, orang yang membacanya atau yang diajak bicara *ngerti*, *gitu*. Jadi, terjadilah apa persoalan-persoalan seperti ini yang kemudian membuat kita menghadapi tantangan sendiri.

Saya adalah orang yang tidak percaya pada argumen bahwa konon katanya bahasa Inggris jauh lebih efektif daripada bahasa Indonesia atau jauh lebih indah. Pada dasarnya bahasa Indonesia juga ketika digarap dengan baik dan ditekuni dengan baik bisa menghasilkan komunikasi-komunikasi yang indah dan bagus *gitu*, *ya*, dan itu menurut saya adalah tantangan utama sekarang.

Jadi, tantangan utama dalam penggunaan bahasa, termasuk di sektor ekonomi kreatif, letaknya justru sebenarnya pada generasi utama yang menjadi pelaku ekonomi kreatif ini, yaitu para generasi yang disebut generasi milenial ini, *ya*. Media dalam hal ini tentunya sangat memegang peranan besar *gitu*, tetapi kalau dari sisi kita sendiri, Badan Ekonomi Kreatif sendiri, kita sebagai lembaga yang bertugas di hilir ini memang fokusnya melakukan kapitalisasi nilai ekonomi. Kalau kita lihat, tidak kurang literatur-literatur nasional kita yang kualitasnya sangat baik, bahkan kadang berpotensi menjadi produk internasional. Itu sebabnya tahun depan literatur itu akan kami bawa ke *London Book Fair*. Ada dua belas karya penulis yang akan dibawa ke *London Book Fair* tahun depan, pada bulan Maret nanti. Saya rasa itu sedikit, sekilas dari saya menyangkut bahasa Indonesia dengan apa yang menjadi tugas utama Badan Ekonomi Kreatif saat ini. Terima kasih.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Gelar Wicara VI**

Judul : Pemanfaatan Bahasa dan Sastra sebagai Perikat Kebinekaan untuk Industri Kreatif, Pariwisata, dan Kearifan Lingkungan  
Pembicara : Ricky Joseph Pesik  
Jabatan : Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif  
Hari, Tanggal: Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 14.15—15.15  
Moderator : Dr. Fairul Zabadi  
Pencatat : 1. Dewi Nastiti  
2. Triwulandari  
3. Nikita Daning Pratami

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Bekraf mendukung Ikatan Penerbit Indonesia untuk menyelenggarakan International Book Fair.
2. Subsektor ekonomi kreatif, Bekraf, memiliki tugas utama, yaitu memanfaatkan sebesar-besarnya konten yang berasal dari bangsa kita sendiri untuk memberikan kemanfaatan ekonomi yang lebih baik.
3. Bekraf merumuskan kebijakan insentif bagi para penulis Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Keluhan para penulis Indonesia adalah pajak yang harus dibayarkan termasuk paling tinggi dibandingkan dengan negara lain.
4. Bahasa Indonesia makin tidak menjadi bahasa utama penulis novel melihat dari banyak judul film yang diangkat dari novel Indonesia berbahasa Inggris
5. Penggunaan bahasa, terutama dari sisi ekonomi kreatif, sangat dipengaruhi oleh generasi milenial sebagai pelaku utama.
6. Industri kreatif adalah kompetisi untuk memberikan insentif bagi para pelaku ekonomi kreatif.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Sastri Sunarti  
Instansi: Badan Bahasa

**Pertanyaan:**

Dalam penelitian di Alor ditemukan (ada 20 bahasa) syair Lego-Lego yang menggambarkan bahwa umat agama Islam dan Kristen adalah saudara. Kerja sama apa yang bisa dirintis oleh Bekraf dan Badan Bahasa dalam menggarap sastra lisan menjadi ekonomi kreatif? Misalnya, bagaimana caranya mengembangkan cerita rakyat Indonesia hingga ke Disney?

**Jawaban:**

Semua produk kreatif dapat berasal dari berbagai kisah (Alor hanyalah satu dari jutaan kemungkinan yang dapat dijadikan produk kreatif). Contoh produk ekonomi kreatif yang didukung oleh Bekraf:



- Terdapat pementasan di luar negeri mengenai Laligo.
- Eko Suprianto membuat tarian dari Jailolo →
- Tiga tahun lalu Bekraf bekerja sama dengan Pixar untuk membuat film berlatar folklore dari Indonesia.

Jadi, Alor sangat terbuka untuk dijadikan ekonomi kreatif.

### **Penanya 2**

Nama : Risky Abian

Instansi: Universitas Airlangga

### **Pertanyaan:**

1. Produk seperti apa yang diunggulkan untuk diperkenalkan ke dunia internasional agar produk tersebut lebih dikenal dahulu sebelum dunia internasional mengenal Indonesia?
2. Bagaimana Bekraf dapat menggerakkan keberanian lokal bangsa Indonesia untuk mengembangkan budaya local?

### **Jawaban:**

1. Indonesia unggul di bidang kerajinan buatan tangan. Untuk itu, Bekraf mengunggulkan produk yang demikian untuk diperkenalkan ke dunia internasional. Selain itu, Bekraf juga memperkenalkan beragam kopi dari Indonesia yang sudah beredar secara internasional dengan bahasa Indonesia *kopi*.
2. Sebagai contoh, Korea Selatan memiliki investasi yang tidak main-main untuk menaklukkan pasar internasional dengan budaya K-Pop yang tidak berhubungan dengan budaya asli Korea. Strategi yang digunakan adalah menguasai pasar dunia terlebih dahulu, lalu memperkenalkan budaya tradisional.

### **Penanya 3**

Nama : Kamal

Instansi: Malang

### **Pertanyaan:**

Pembelajaran daring khusus BIPA masuk ke sektor mana dalam Bekraf?

### **Jawaban:**

Bekraf bekerja sama dengan MarketHub di Amerika untuk memasarkan produk hasil karya generasi muda di pasar internasional. Pada akhirnya, program tidak dilihat masuk dari sektor mana, tetapi dilihat dari segi potensi dan kemanfaatannya di pasar. Yang terpenting adalah inovasi. Pada saat ini Bekraf sedang mengakselerasi enam belas sektor Bekraf.

### **Penanya 4**

Nama : Prof. Emi Emilia, M.Ed., Ph.D.

Instansi: Badan Bahasa





**Pertanyaan:**

Manfaat apa yang dapat didapatkan oleh Badan Bahasa dari keikutsertaannya pameran buku, seperti London Book Fair atau Frankfurt Book Fair?

**Jawaban:**

Manfaatnya sudah tecermin dari nama acara itu. London Book Fair menjadi media perluasan produk pasar dan pengenalan budaya serta menunjang literasi nasional. Novel Indonesia yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dapat membuka jalan untuk memperkenalkan budaya Indonesia.

**Isu-Isu Penting:**

1. Penaklukan pasar internasional perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum suatu negara memperkenalkan budayanya.
2. Dalam pengembangan dan kemajuan ekonomi kreatif, inovasi merupakan hal penting dan bernilai.
3. Pengembangan bahasa Indonesia melalui pengembangan ekonomi kreatif (Bekraf) sangat dipengaruhi oleh perilaku generasi milenial sebagai pengguna bahasa Indonesia masa kini.



## 2. Peran Teknologi dan Kerja Sama Tim dalam Pendokumentasian Bahasa

### PERAN TEKNOLOGI DAN KERJA SAMA TIM DALAM PENDOKUMENTASIAN BAHASA

*On the Role of Technology and Team Work in Language Documentation*

**Nikolaus P. Himmelmann**

Universität zu Köln

[sprachwissenschaft@uni-koeln.de](mailto:sprachwissenschaft@uni-koeln.de)

#### **Abstrak**

Jika dibandingkan dengan pendeskripsian bahasa dengan pendekatan yang lebih tradisional, ada dua ciri penting pendokumentasian bahasa, yaitu perhatian eksplisit terhadap teknologi yang dapat membuat pekerjaan pendokumentasian bahasa yang belum terdokumentasi dengan baik menjadi lebih efisien dan penekanan tentang perlunya tim yang terdiri atas orang-orang dengan keahlian yang berbeda-beda dan jenis keahlian berbeda untuk bekerja bersama dalam usaha pendokumentasian dan konservasi. Jika dilihat dari kontribusinya saat ini, kedua hal tersebut berkaitan erat satu sama lain dan saling mendukung satu sama lain. Repositori-bahasa daring (arsip) memungkinkan kelompok pengguna yang berbeda untuk mengakses dan bekerja dengan materi yang dikumpulkan pada pendokumentasian bahasa. Pada saat yang bersamaan, arsip ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui dokumentasi dengan cara menambahkan data baru atau membuat anotasi dan analisis lanjutan. Sejalan dengan itu, untuk mendapatkan dokumentasi yang baik, menjadikan penutur asli dan komunitas tutur sebagai partner aktif dalam proyek dokumentasi merupakan hal yang esensial. Hal itu bahkan lebih esensial bagi upaya revitalisasi. Dalam hal ini, teknologi berbasis telepon pintar bisa membantu memperluas kemungkinan partisipasi penutur asli dan pihak lain yang tertarik.

**Kata-kata kunci:** arsip bahasa, repositori dinamis, aplikasi telepon pintar, kerja sama tim

#### **Abstract**

*Two important features of language documentation, as opposed to more traditional approaches to language description, are its explicit concern for technologies that help to make work on underdocumented languages more efficient and its emphasis on the need for teams of people with different skills and kinds of expertise to work together in documentation and conservation efforts. As shown in the current contribution, these two concerns are closely interlinked and mutually reinforce each other. Online dynamic language repositories ('archives') make it possible for different user groups to access and work with the materials compiled in a language documentation. At the same time, they make it possible for such users to enhance the documentation by adding new data or further annotation and analysis. Similarly, for good documentations it is essential that native speakers and the speech community at large become active partners in the documentation enterprise.*



*This holds even more so for revitalization efforts. Here smart-phone based technology may help to widen the participatory possibilities for native speakers and other interested parties.*

**Keywords:** *language archives, dynamic repository, smart phone applications, team work*

## **PENDAHULUAN**

Mengikuti Himmelmann (2006:1) tujuan pendokumentasian bahasa dapat didefinisikan sebagai penciptaan “rekaman bahasa yang kekal dan multiguna”, di sini ‘bahasa’ harus dipahami dalam pengertian luas yang meliputi semua repertoar komunikasi yang tersedia di komunitas tutur pada suatu masa. Inti pendokumentasian bahasa terdiri atas contoh perilaku linguistik (idealnya rekaman video tentang interaksi linguistik) dan contoh pengetahuan metalinguistik (komentar penutur asli dan pandangan tentang bentuk dan praktik linguistik, sering kali berdasarkan elisitasi atau wawancara, dan juga diamati pada aktivitas inti dokumentasi, yaitu pentranskripsian dan penerjemahan).

Agar dapat digunakan dengan mudah oleh pihak lain yang tertarik, khususnya mereka yang tidak terlibat langsung dalam usaha pendokumentasian bahasa, dokumentasi bahasa harus dikurasi secara digital. Seksi 2 menjelaskan apa itu kurasi digital dengan berfokus pada arsip bahasa. Aplikasi telepon pintar menyediakan tempat baru untuk mengakses dan berkontribusi untuk pendokumentasian bahasa. Topik ini dibahas dengan ringkas pada Seksi 3 yang berfokus pada dunia kolaborasi dalam pendokumentasian bahasa. Potensi maksimal dari pendokumentasian bahasa dapat tercapai ketika orang yang memiliki kemampuan dan jenis keahlian yang berbeda bekerja secara bersama-sama.

### **Kurasi Digital dan ‘Arsip Partisipatori’**

Dalam linguistik dokumentasi, mengacu repositori digital untuk materi dokumentasi sebagai arsip bahasa merupakan hal yang umum. Bandingkan contoh (lihat Berez-Kroeker & Henke (2018:354ff) untuk contoh yang lebih banyak dan lebih rinci):

- *The Language Archive* (<https://tla.mpi.nl>), yang meliputi *DoBeS Archive* <https://tla.mpi.nl/resource/dobes-archive/>;
- *the Pacific and Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures* (PARADISEC, <http://www.paradisec.org.au/>);
- *the Endangered Languages Archive* (ELAR, <https://elar.soas.ac.uk/>);
- *the Archive of the Indigenous Languages of Latin America* (AILLA, <https://ailla.utexas.org/>).

Pemanfaatan arsip dalam pengacuan repositori semacam itu telah mengakibatkan kebingungan tentang penggunaan istilah arsip yang diasosiasikan dengan entitas tertutup dan statis. Secara tradisional, arsip (kertas) hanya terdiri atas koleksi tertutup, seperti tulisan (huruf, draf manuskrip, dan lain-lain) tentang orang penting atau rekaman tentang lembaga administrasi atau politik pada suatu masa (contohnya, debat di Parlemen Inggris pada 1957). Dokumentasi bahasa, idealnya, meliputi repositori yang terbuka untuk memasukkan data dan anotasi baru. Seperti yang akan kita lihat selanjutnya, konsep baru tentang *Arsip Partisipatori* tampaknya akan lebih cocok dengan pendokumentasian bahasa. Sebelum mengklarifikasi isu



ini lebih lanjut, penentuan jenis data yang dapat dimasukkan dalam repositori menjadi hal penting.

Seperti disebutkan sebelumnya, dokumentasi bahasa terdiri atas, di satu sisi, contoh perilaku linguistik yang teramati, yaitu rekaman audio-video dengan materi pendukung yang dapat membantu pemahaman dan penginterpretasian contoh yang ada.<sup>1</sup> Di sisi lain, arsip terdiri atas contoh pengetahuan metalinguistik yang juga bisa berbentuk rekaman (seperti rekaman seorang penutur dan linguist mendiskusikan transkripsi atau transliterasi; atau rekaman tentang seorang penutur yang sedang menjelaskan taksonomi tumbuhan atau hubungan kekeluargaan dengan menggunakan bahasa kontak). Akan tetapi, arsip ini sering kali hanya terdiri atas catatan yang ditulis linguist saat berdiskusi dengan seorang penutur tentang bentuk dan praktik linguistik. Dalam hal ini, bahan pendukung harus ditambahkan.

Materi pendukung, atau dalam istilah yang lebih teknis *apparatus*, meliputi transkripsi dan transliterasi peristiwa tutur yang direkam, anotasi lanjutan tentang aspek tata bahasa dan budaya dari peristiwa tutur, foto-foto yang mendokumentasikan peristiwa tutur, catatan tangan yang dibuat saat perekaman, dan materi lain yang relevan untuk memahami dan menginterpretasi rekaman.

Sementara itu, pada prinsipnya ada beberapa cara untuk mengorganisasi data yang dikumpulkan untuk dokumentasi bahasa: unit dasar pengorganisasian data yang ditemukan paling bermanfaat adalah *sesi*, yaitu sepaket fail yang memuat satu peristiwa komunikasi seperti yang terlihat di dalam daftar sesi. Paket sesi biasanya terdiri atas fail dengan tipe yang berbeda-beda, seperti fail media dengan format-format yang berbeda (wav, mpeg, jpg), fail XML untuk anotasi, pdf untuk catatan, dan dokumen tertulis lainnya yang juga berperan dalam peristiwa tutur.

Durasi peristiwa tutur yang dikehendaki bisa pendek (misalnya, gurauan atau cerita pendek) atau sangat panjang (misalnya, pertemuan politik yang berlangsung selama beberapa hari), ukuran dan kompleksitas sesi bervariasi bergantung pada peristiwa tutur yang direkam. Peristiwa tutur juga bisa berbeda berdasarkan tipe interaksinya: percakapan sehari-hari, percakapan yang berorientasi pada tugas, narasi, elisitasi, dan lain-lain.

Setiap sesi harus berisi fail metadata yang tidak hanya merinci fail-fail yang ada dalam satu sesi, tetapi juga memuat informasi dasar tentang kapan, di mana, siapa, dan apa yang terlibat dalam suatu peristiwa tutur. Kapan peristiwa tutur itu terjadi? Siapa yang berpartisipasi? Apa topik dasar dan tujuannya? Peralatan apa yang dipakai untuk merekam? Sesi itu termasuk proyek dokumentasi yang mana?

Koleksi dari keseluruhan sesi, yaitu seluruh dokumentasi bahasa, juga memerlukan metadata, yang menyatakan tujuan proyek dokumentasi, siapa yang berpartisipasi, konvensi apa yang diikuti (ortografi, penglosan, dll.) dan informasi lain yang diperlukan untuk menginterpretasi data yang ada dalam koleksi. Bagian utama dari metadata pada level koleksi adalah pengantar tentang bahasa dan budaya dari komunitas yang didokumentasikan. Di sini perbedaan antara dokumentasi dan deskripsi bahasa dari segi analisis yang lebih mendalam menjadi kabur. Semakin

---

<sup>1</sup> Untuk membuat eksposisi ini tetap sederhana dan untuk tujuan diskusi ini, saya berasumsi bahwa dokumentasi bahasa modern sebagian besar berbentuk digital. Rekaman audio-video dan hampir semua jenis materi pendukung sudah diproduksi secara digital, pengecualian untuk catatan tertulis yang biasanya harus dipindai agar dapat dimasukkan dalam repositori digital. Pemuatan materi peraturan, seperti rekaman analog dari masa lampau, foto lama, dan catatan lapangan yang dapat memunculkan permasalahan tidak didiskusikan di sini.



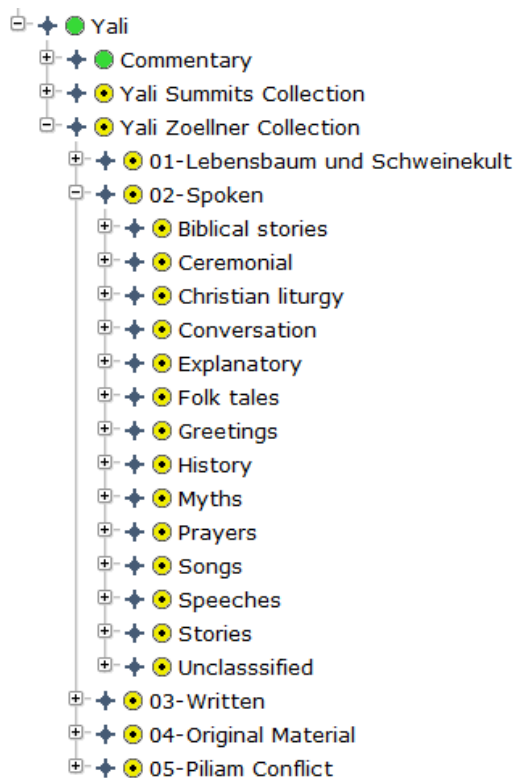
analitis materi yang terdapat pada aparatus di level koleksi (misalnya, tata bahasa lengkap, bukan sekadar tata bahasa ringkas; kamus lengkap dengan struktur subentri yang detail, bukan sekadar *database* lembar kerja yang berisi entri leksikal, dll.), semakin bermanfaat koleksi tersebut untuk memahami dan menginterpretasi data yang terkumpul pada level sesi.

Tabel 1 (dari Himmelmann 2016:14) menyimpulkan struktur dokumentasi bahasa sebagai berikut.

**Tabel 1 Format dasar dokumentasi bahasa**

Perekaman terhadap perilaku linguistik yang teramati dan pengetahuan metalinguistik	Per Sesi	Untuk Seluruh Dokumentasi
		Metadata <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu dan lokasi perekaman</li> <li>• Partisipan</li> <li>• Tim perekaman</li> <li>• Peralatan perekaman</li> <li>• Deskripsi isi</li> <li>• ...</li> </ul> Anotasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transkripsi</li> <li>• Transliterasi</li> <li>• Glos lanjutan dari segi linguistik dan etnografi serta komentar</li> </ul>

Sepengetahuan saya, semua repositori untuk dokumentasi bahasa yang ada saat ini pada prinsipnya sepakat untuk membuat sesi sebagai inti dari struktur repositori; isu yang masih terbuka adalah tentang apakah struktur pohon yang lebih terperinci diperlukan atau tidak, yaitu struktur yang menempatkan sesi dengan isi yang sama pada cabang yang sama. Pada pohon semacam ini, sesi monolog dapat dibedakan dengan sesi polilog. Dalam sesi monolog, seseorang dapat membedakan cerita rakyat, cerita kehidupan pribadi, teks procedural, dll., seperti yang ditunjukkan oleh pohon bagian dari arsip DoBes yang lama pada Gambar 1. Alternatif untuk struktur pohon semacam itu bersifat *faceted browsing* (multiramban). Akan tetapi, struktur ini menuntut metadata yang sistematis untuk setiap sesi dan dipercaya mengandung informasi yang diperlukan untuk setiap kategori perambanan.



**Gambar 1 Contoh Struktur Pohon Dokumentasi Bahasa  
(Versi Lama Arsip DoBes)**

Dari daftar elemen yang harus dimasukkan dalam dokumentasi bahasa, jelas bahwa kurasi digital merupakan suatu keharusan dalam dokumentasi bahasa. Tentu saja dengan prinsip bahwa seseorang dapat menyimpan kaset rekaman dan transkripsi cetak, terjemahan, dll. secara bersamaan. Namun, untuk menggunakan materi yang tersimpan dengan cara ini akan sangat rumit dan terbatas hanya untuk orang yang memiliki akses ke tempat penyimpanannya. Ketersediaan rekaman video dan audio digital secara fundamental telah mengubah cara peneliti dan pihak lain yang tertarik untuk mengakses dan bekerja dengan tipe media ini. Kenyataannya, media-media itu sesungguhnya menjadi titik tolak model dasar sesi inti pada dokumentasi bahasa, yaitu transkripsi, terjemahan, dan anotasi lain yang idealnya selaras-waktu dengan rekaman. Hal itu tidak hanya akan memudahkan pengecekan rekaman yang asli, tetapi juga menjadi spesifik dan tepat untuk menunjukkan asal suatu anotasi. Dengan program seperti ELAN (<https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/>), anotasi selaras-waktu dapat ditunjukkan dengan nyaman dan efisien. Program ini memiliki manfaat tambahan, yaitu dapat menyimpan anotasi dalam format XML tanpa hak milik yang sangat penting dalam penyimpanan yang bersifat abadi dan portabel (bandingkan Bird & Simons (2003) untuk informasi tentang pentingnya portabilitas dalam dokumentasi bahasa).

Kurasi digital tidak hanya penting untuk membuat dokumentasi bahasa dapat diakses oleh pihak lain yang tertarik, tetapi hal ini juga penting bagi anggota tim dokumentasi bahasa yang bekerja untuk menganotasi dan menganalisis data. Koleksi digital yang dikurasi dengan tepat juga merupakan lingkungan penelitian digital tempat peneliti mengakses dan membagi data. Karena semua fail media,



khususnya video, yang cenderung berukuran besar, dokumentasi bahasa biasanya memperkecil ukuran media tersebut beberapa ratus *gigabyte* atau *terabyte*, bahkan lebih menjadi data yang ukurannya bisa ditangani dalam laptop standar atau komputer *desktop*. Maka dari itu, kurasi digital yang tepat menjadi urusan pribadi peneliti karena jika tidak dilakukan, mereka tidak dapat bekerja secara produktif dengan data yang dikumpulkan dalam pendokumentasian bahasa.

Akhirnya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kurasi digital penting untuk bekerja secara kolaboratif pada kumpulan data yang telah ditentukan. Peneliti-peneliti berbeda yang bekerja bersama dalam sebuah tim dokumentasi perlu mengoordinasikan anotasi dan analisis mereka. Contoh yang tipikal adalah pangkalan data leksikal yang biasanya menjadi unsur utama dalam dokumentasi. Peneliti yang berbeda akan menambahkan entri ketika mengerjakan transkripsi atau mengelisisasi data dari penutur asli. Transkripsi dan terjemahan harus dicek dan direvisi, dan seterusnya. Semua proses ini akan berjalan dengan sangat baik jika dokumentasi tersedia dalam bentuk digital.

Yang paling penting adalah bahwa kelompok orang yang bekerja untuk memperkaya dan memperbesar dokumentasi bahasa seharusnya atau idealnya tidak terbatas pada anggota tim dokumentasi yang telah ditentukan dari awal. Akan tetapi, peneliti lain dan anggota masyarakat yang tertarik, khususnya mereka yang berasal dari komunitas tutur bahasa yang didokumentasikan harus memiliki kesempatan untuk mengomentari, menambah, dan memberi saran terhadap dokumentasi bahasa yang sedang dikembangkan dengan kesempatan untuk dapat mengakses dokumentasi dan memberikan komentar, perbaikan, dan saran pada aspek-aspek yang mereka kuasai. Contoh di luar ranah dokumentasi bahasa yang memungkinkan penulisan dan penerbitan yang bersifat kolaboratif disediakan oleh *Overleaf* atau *Google Docs*. Saat ini, repositori untuk dokumentasi bahasa belum menyediakan kesempatan kolaborasi yang sesungguhnya secara daring. Namun, hal itu sebenarnya merupakan langkah selanjutnya yang harus dicapai dalam pengembangan teknologi dokumentasi bahasa selanjutnya.

Kolaborasi pada paragraf berikut ini merupakan inti dari proposal terkini untuk merekonseptualisasi arsip sebagai Arsip Partisipatori (lihat Berez-Kroeker & Henke 2018, Seksi 3, untuk diskusi dan acuan yang lebih lengkap). Definisi sederhana tentang Arsip Partisipatori dikemukakan oleh Theimer (2011).

Sebuah organisasi, situs, atau koleksi tempat orang-orang selain pengarsip profesional mengontribusi pengetahuan atau sumber daya yang berakibat pada peningkatan pemahaman terhadap materi arsip, yang biasanya dalam lingkungan daring.

Perlu dicatat bahwa isu ini bukanlah isu khusus dalam hal dokumentasi bahasa, melainkan isu tentang semua aktivitas pengarsipan di semua ranah. Untuk repositori dokumentasi bahasa, Arsip Partisipatori tampak sebagai pendekatan yang tepat karena arsip ini menghindari bentuk arsip tradisional yang biasanya statis dan tertutup. Secara alamiah, arsip partisipatori membutuhkan keterbukaan dan pemutakhiran yang dinamis sehingga sesuai dengan tuntutan repositori dinamis untuk dokumentasi bahasa.

### **Kolaborasi dan Aplikasi Mobil (*Mobile*)**

Melanjutkan diskusi tentang kolaborasi pada bagian akhir sesi sebelumnya, perkembangan terkini yang perlu disebutkan di sini adalah menggunakan aplikasi



mobil untuk memperbanyak opsi pilihan partisipasi dalam dokumentasi bahasa, khususnya bagi penutur asli.

Dokumentasi bahasa yang baik memerlukan partisipasi dan kolaborasi dari penutur asli secara individu dan komunitas tutur secara keseluruhan. “Partisipasi dan kolaborasi” berarti bahwa anggota komunitas tutur berpartisipasi dalam pendokumentasian di luar perannya yang secara tradisional hanya diwawancara dan diamati, dengan kata lain, sebagai objek penelitian. Sebaliknya, praktik dokumentasi yang baik membutuhkan penutur asli untuk menjadi anggota tim dokumentasi yang tetap dan aktif, mengemukakan agenda, harapan, dan keinginan yang dapat diperhitungkan ketika merencanakan aktivitas proyek dokumentasi bahasa.

Dalam konteks ini, aplikasi mobil menyediakan cara untuk meniadakan partisipasi secara fisik di lokasi tertentu. Bird (2018:842) menjelaskan:

Penutur bahasa-bahasa yang hampir punah secara cepat dapat memperoleh jaringan internet yang luas melalui peralatan mobil. Sementara itu, teknologi mobil sosial melanjutkan untuk mentransformasi cara orang untuk bekerja bersama. Saya percaya bahwa kondisi tersebut tepat dengan pengembangan perangkat lunak (*software*) generasi baru untuk bahasa-bahasa hampir punah. Perangkat lunak ini akan memungkinkan cara baru bagi linguist untuk berkolaborasi dengan penutur di tanah airnya sendiri dengan diaspora yang tersebar di seluruh dunia sehingga tercipta dokumentasi berskala besar yang berkualitas tinggi.

Seperti didiskusikan dalam artikel buku panduan Bird (2018) ada banyak isu yang didiskusikan dalam pengembangan aplikasi semacam itu. Yang paling penting, aplikasi tersebut hanya akan digunakan jika penutur asli terlibat dalam pengembangannya. Perkembangan terjauh sampai saat ini adalah aplikasi kamus, yang cenderung menjadi ketertarikan terbesar bagi penutur asli. Pengembangan ini meliputi aplikasi yang memungkinkan seseorang untuk mencari kata dalam kamus melalui telepon pintar. Selain itu, pengembangan ini juga meliputi aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengusulkan entri baru atau untuk mengoreksi entri yang sudah ada.

Laman 6 *Apps For Endangered Languages – K International* (<https://www.k-international.com/blog/apps-for-endangered-languages/>) mengilustrasikan pengembangan tersebut. Salah satu aplikasi pertama jenis ini adalah *Ma! Iwaidja*, untuk bahasa Australia, Iwaidja, (<https://appadvice.com/app/ma-iwaidja-dictionary/674860973>). Aplikasi ini meliputi kamus, buku frasa, dan satu komponen yang disebut pembuat kata (*wordmaker*) yang dapat dipakai oleh pengguna untuk memasang frasa dan kalimat sehingga tata bahasa dasar bahasa Iwaidja dapat dieksplorasi secara menyenangkan.

Kebanyakan aplikasi mobil yang ada saat ini diciptakan untuk bahasa India Amerika di Kanada dan AS, seperti yang dapat diamati pada laman *First Voices Keyboard app* (<https://www.firstvoices.com/sections/apps>). Aplikasi ini menghadapi satu masalah umum untuk mendukung bahasa kecil yang belum terdokumentasi dengan baik dan khususnya yang terancam punah, yaitu terbatasnya papan tik (*keyboard*) yang dapat menampilkan semua huruf dari alfabet yang digunakan dalam bahasa tersebut.

Selanjutnya, walaupun tidak dibahas secara khusus di bagian ini, segala sesuatu yang telah didiskusikan sehubungan dengan partisipasi, kolaborasi, dan





pemanfaatan peran teknologi lebih berperan penting pada upaya konservasi dan revitalisasi bahasa. Konservasi dan revitalisasi bahasa hanya akan berhasil jika komunitas tutur menginginkannya dan terlibat aktif di dalamnya. Dari banyak segi, memiliki aplikasi mobil untuk mengaitkan diri dengan bahasa dan budaya tradisional dengan cara yang menyenangkan di rumah dan di antara teman menjanjikan hal yang lebih penting dan lebih berhasil dibandingkan dengan beberapa jam materi muatan lokal di kurikulum sekolah dasar. Cara ini tidak untuk menyangkal bahwa muatan lokal juga penting dalam konservasi bahasa karena muatan lokal membantu untuk meningkatkan status bahasa dan menunjukkan dukungan institusi. Namun, bahasa tradisional berkembang di rumah dan di domain pribadi serta umumnya tidak memiliki fungsi di dalam pendidikan dan komunikasi antarkelompok.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Berez-Kroeker, Andrea L. and Ryan Henke. (2018). Language Archiving. In: Kenneth L. Rehg & Lyle Campbell (eds), *The oxford handbook of endangered languages*. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190610029.013.18
- Bird, Steven and Gary Simons. (2003). Seven dimensions of portability for language documentation and description. *Language* 79:557-582.
- Bird, Steven. (2018). Designing Mobile Applications for Endangered Languages. In: Kenneth L. Rehg & Lyle Campbell (eds), *The Oxford Handbook of Endangered languages*. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190610029.013.40.
- Himmelman, Nikolaus P. (2006). Language documentation: What is it and what is it good for? In: J. Gippert, N. P. Himmelman & U. Mosel (eds), *Essentials of language documentation*. Berlin: Mouton de Gruyter, 1-30.
- Theimer, Kate. (2011). Exploring the Participatory Archives: What, Who, Where, and Why. Paper presented at the Annual Meeting of the Society of American Archivists, Chicago, Illinois, August 21–26. [www.slideshare.net/ktheimer/theimer-participatory-archivessaa-2011](http://www.slideshare.net/ktheimer/theimer-participatory-archivessaa-2011). Accessed 21 August 2018.



## PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA DALAM DOKUMENTASI BAHASA DAN SASTRA DAERAH

*On the Role of Technology and Team Work in Language Documentation*

**Nikolaus P. Himmelmann**  
Universität zu Köln  
[sprachwissenschaft@uni-koeln.de](mailto:sprachwissenschaft@uni-koeln.de)

### **Abstract**

*Two important features of language documentation, as opposed to more traditional approaches to language description, are its explicit concern for technologies that help to make work on underdocumented languages more efficient and its emphasis on the need for teams of people with different skills and kinds of expertise to work together in documentation and conservation efforts. As shown in the current contribution, these two concerns are closely interlinked and mutually reinforce each other. Online dynamic language repositories ('archives') make it possible for different user groups to access and work with the materials compiled in a language documentation. At the same time, they make it possible for such users to enhance the documentation by adding new data or further annotation and analysis. Similarly, for good documentations it is essential that native speakers and the speech community at large become active partners in the documentation enterprise. This holds even more so for revitalization efforts. Here smart-phone based technology may help to widen the participatory possibilities for native speakers and other interested parties.*

**Keywords:** *language archives, dynamic repository, smart phone applications, team work*

### **INTRODUCTION**

Following Himmelmann (2006:1) the goal of language documentation can be defined as creating “a lasting, multipurpose record of a language”, where ‘language’ is to be understood in the broadest possible sense, including all communicative repertoires available in a speech community at a given point in time. The core of a language documentation consists of specimens of linguistic behaviour (ideally video recordings of linguistic interactions) and specimens of metalinguistic knowledge (native speakers’ comments and insights on linguistic forms and practices, often based on elicitation or interviews, but also observed in the documentary core activities of transcription and translation).

In order to be easily usable by different interested parties, and especially ones not involved in the actual documentation efforts, language documentations need to be digitally curated. Section 2 explains what is involved in digital curation, focusing language archives. Smart phone applications provide a new venue to access, and contribute to, language documentations. This topic is briefly taken up in section 3 which is concerned with the collaborative nature of language documentations. The full potential of a language documentation can only be achieved when people with different skills and kinds of expertise work together.



## On Digital Curation and ‘Participatory Archives’

In documentary linguistics, it is common to refer to digital repositories for documentary materials as *language archives*, compare for example (see Berez-Kroeker & Henke (2018:354ff) for more examples and further details):

- *The Language Archive* (<https://tla.mpi.nl>), which includes the *DoBeS Archive* (<https://tla.mpi.nl/resource/dobes-archive/>);
- the *Pacific and Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures* (PARADISEC, <http://www.paradisec.org.au/>);
- the *Endangered Languages Archive* (ELAR, <https://elar.soas.ac.uk/>);
- the *Archive of the Indigenous Languages of Latin America* (AILLA, <https://ailla.utexas.org/>).

Using *archive* in reference to such repositories has led to some confusion as the notion of an ‘archive’ is associated by many with a closed, static entity. Traditionally, (paper) archives in fact only housed closed collections such as the writings (letters, manuscript drafts, etc.) of an important person or records of an administrative or political body for a specific year (e.g. the debates of the British parliament in 1957). But language documentations, ideally, should be evolving repositories open to include new data and new annotations. As we will see below, the new concept of *participatory archives* would appear to be more fitting for language documentations. Before clarifying this issue further, it will be necessary to briefly indicate what kinds of data are included in such a repository.

As mentioned above, language documentations consist, on the one hand, of specimens of observable linguistic behaviour, i.e. audio-visual recordings with supplementary materials that help to understand and interpret the specimen at hand.<sup>2</sup> On the other hand, they consist of specimens of metalinguistic knowledge, which may be recordings as well (e.g. recording of a speaker and a linguist discussing transcription or translation or recording of a speaker explaining plant taxonomies or kinship relations in a contact language) but often simply consist of handwritten notes taken down when discussing with native speakers linguistic forms or practices. Here as well, supplementary materials may be added.

Supplementary materials, or the *apparatus* in more technical parlance, include a transcription and translation of the recorded speech events, further annotations regarding grammatical or cultural aspects of these speech events, possibly some photos documenting the speech event, handwritten notes made at the time of the recording, and whatever else may be of relevance for understanding and interpreting the recording.

While in principle there are various ways of how to organize the data brought together in a language documentation, it has been found that the most useful basic organization unit is the *session*, i.e. the bundle of all the files pertaining to one communicative event as just listed. Session bundles thus typically include files of different types, i.e. media files of different formats (wav, mpeg, jpg), XML files for

---

<sup>2</sup> To keep the exposition simple, I assume for the purposes of this discussion that modern language documentations are largely born digital. That is, audio-video recordings as well as most kinds of additional materials are already produced digitally, the major exception being written notes which typically need to be scanned in order to be included in a digital repository. The inclusion of legacy materials such as analog recordings from earlier times and old fotos and fieldnotes pose special problems not discussed here.



annotations and pdfs for notes and other written documents that may have played a role in the event.

Communicative events in the intended sense can be short (e.g. a short joke or story) or very long (e.g. a political meeting extending over several days), the size and complexity of the session varying accordingly. They can also be of different interactional types: everyday conversation, task oriented conversation, narration, elicitation, etc.

For each session, there has to be a metadata file that not only specifies which files belong to the session but also provides basic information on when, where, who, what of the event. Where did the event take place and when? Who participated? What was the basic topic and purpose? What equipment was used for the recording? Which documentation (project) does the session belong to?

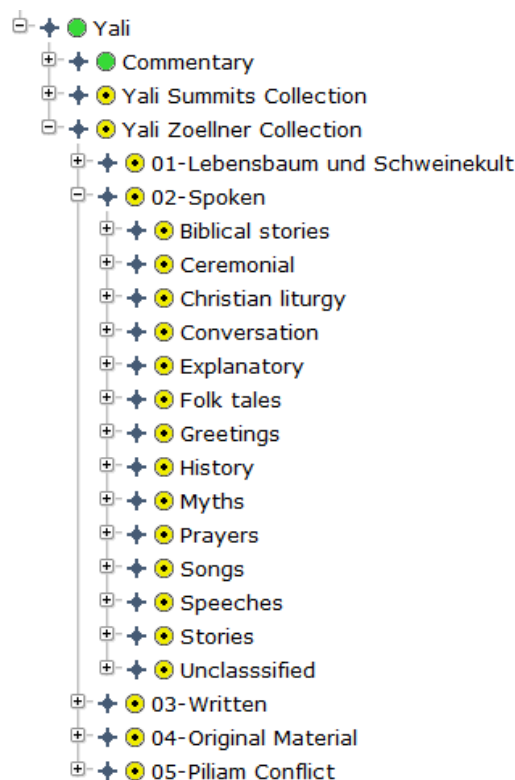
The collection of all sessions, i.e. the whole language documentation, also needs metadata, spelling out the goals of the documentation project, who participated, which conventions are followed (orthography, glossing, etc.) and other information needed to interpret the data in the collection. A major part of these collection-level metadata is an introduction to the language and culture of the community being documented. Here, the distinction between documentation and description in the sense of more in-depth analysis easily becomes blurred. The more analytic materials the collection-level apparatus contains (e.g. full grammars rather than a short sketch grammar, full dictionary with fine-grained subentry structure vs. a working database of lexical entries, etc.), the more useful it is for understanding and interpreting the data collected on the session level.

Table 1 (from Himmelmann 2006:14) summarizes the structure of a language documentation as just outlined.

Table 1. *Basic format of a language documentation*

	Per session	For documentation as a whole
recordings/records of observable linguistic behavior and metalinguistic knowledge	Metadata time and location of recording participants recording team recording equipment content descriptors	Metadata location of documented community project team(s) contributing to documentation participants in documentation acknowledgements
	Annotations transcription translation further linguistic and ethnographic glossing and commentary	external access resources introduction orthographical conventions ethnographic sketch sketch grammar glossing conventions indices links to other resources ...

While to the best of my knowledge, all repositories for language documentations to date basically agree on making the session the core of the repository structure, it is an open issue whether a more detailed tree structure is needed that places sessions with a similar content into the same branch. In such a tree, monologue sessions could be distinguished from polylogue ones. Within monologues one could distinguish between folk stories, personal life stories, procedural texts, etc., as illustrated with the partial tree from the old DoBeS archive in Figure 1. The alternative to such a tree structure is *faceted browsing* which, however, presupposes that the metadata for sessions systematically and reliably contain the information needed for the browsing categories.



**Figure 1 Example of a Tree Structure for a Language Documentation  
(From Old Version of Dobes Archive)**

From the preceding list of elements included in a language documentation it should be obvious that digital curation is imperative for language documentation. Of course, in principle one could store recording tapes and printed transcriptions, translations etc. together, but to use materials stored in this way would be enormously cumbersome and restricted to people who have physical access to the storage place. The availability of digital video and audio recordings has fundamentally changed the way researchers and other interested parties can access and work with these media types. In fact, they have literally become the anchor point for the prototypical session at the core of a language documentation. That is, transcriptions, translations and other annotations should ideally be time-aligned with the recording not only to make it possible to easily check the original record, but also to be specific and precise as to where exactly a given bit of annotation belongs. With programs such as ELAN (<https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/>), time-aligned annotation can be performed comfortably and efficiently. These



programs have the additional benefit that they store the annotations in the non-proprietary XML format, which is essential for long-term preservation and portability (cp. Bird & Simons (2003) for the importance of *portability* in language documentation).

Digital curation is not only imperative to make a language documentation accessible to other interested parties, but it is also essential for the members of the documentation team who work on annotating and analysing the data. That is, a properly curated digital collection is also a digital research environment where different researchers can access and share data. As media files, especially video, tend to be bulky, language documentations usually comprise several hundred gigabyte or even a terabyte or more, an amount of data not easily handled on standard laptop or desktop computers. Hence, proper digital curation of the data also is in the researchers' very own interest, as otherwise they cannot productively work with the data gathered in language documentation.

Finally, as already indicated above, digital curation is essential for working collaboratively on a given data set. Different researchers working together in a documentation team need to coordinate their annotations and analyses. A prototypical example is the lexical database that will typically be a major constituent of a documentation. Different researchers will add entries when working through transcripts or eliciting items with native speakers. Transcriptions and translations need to be checked and revised. And so on. All of this works best, if the documentation is digitally available.

Importantly, the group of people working on further enriching and enlarging a language documentation need not, and ideally should not, be limited to members of the original documentation team. Instead, other interested researchers and members of the public, especially ones from the speech community being documented, should have the possibility to comment on, add to, and make suggestions for an evolving language documentation by being able to access the documentation and place comments, corrections and suggestions at the specific points they pertain to. An example outside the domain of language documentation would be the possibilities for collaborative writing and publishing provided by *Overleaf* or *Google Docs*. Currently, repositories for language documentations do not yet provide such possibilities for true online collaboration. But this is clearly the next main step to be achieved in further developing this technology.

Collaboration along the lines sketched in the preceding paragraphs is at the core of the recent proposal to reconceptualize archives as *participatory archives* (see Berez-Kroeker & Henke 2018, section 3, for fuller discussion and references). A simple definition of an participatory archive is provided by Theimer (2011: )

An organization, site or collection in which people other than the archives professionals contribute knowledge or resources resulting in increased understanding about archival materials, usually in an online environment.

Note that this is not an issue specific to language archives, but concerns archiving activities in all domains. For language documentation repositories it would appear that this is the right approach, as it avoids the traditional association of an archive with being static and closed. By their very nature, participatory archives require openness and dynamic update, and hence exactly fit the requirements for a dynamic repository for language documentations.



## Collaboration and Mobile Apps

Continuing the discussion of collaboration at the end of the preceding section, another recent development deserves brief mention, i.e. the use of mobile apps to enlarge the participatory options in language documentations, especially for native speakers.

Good language documentation needs the participation and collaboration of individual native speakers and the community as a whole. “Participation and collaboration” mean that members of the speech community participate in the documentation in a way that goes beyond the traditional role of being interviewed and observed, i.e. being the object of research. Instead, good documentary practice requires them to be full active members of the documentation team, proposing their own agenda, wishes and preferences to be taken into account when planning project activities.

In this context, mobile apps provide a way to dissociate participation from physical presence in specific locations. Bird (2018:842) explains:

Speakers of the world’s endangered languages are rapidly gaining access to broadband internet on mobile devices. Meanwhile, social mobile technologies continue to transform the way people work together. I believe that conditions are ripe for the development of a new generation of software for endangered languages. This software will enable new ways for linguists to collaborate with speakers in ancestral homelands and worldwide diasporas to produce highquality large-scale documentation.

As discussed in Bird’s handbook article (2018), there are many issues involved in developing such apps. Most importantly, they only will be used, if native speakers are involved in their development. Most developments so far, not by accident, are dictionary applications, as these tend to be of greatest interest to native speakers. These include applications that allow one to look up words in a dictionary on a smart phone. But they also include applications that make it possible for users to propose new entries or to correct existing ones.

The website *6 Apps For Endangered Languages - K International* (<https://www.k-international.com/blog/apps-for-endangered-languages/>) illustrates such developments. One of the first apps of this kind was *Ma! Iwaidja*, for the Australian language Iwaidja (<https://appadvice.com/app/ma-iwaidja-dictionary/674860973>). It includes a dictionary and phrasebook and also a component called “wordmaker” with which users can try to put together phrases and sentences and thus playfully explore the basics of Iwaidja grammar.

Most mobile apps to date have been created for American Indian languages in Canada and the USA, as can be gleaned from the website *First Voices Keyboard app* (<https://www.firstvoices.com/sections/apps>). This app addresses another common problem in supporting smaller, underdocumented and especially endangered languages, i.e. the lack of keyboards that represent all letters of the alphabet used for the language in question.

While not specifically the topic of this chapter, it should be obvious that everything that has been said above about participation, collaboration and the enabling role of technology in this regard, holds even more strongly in the case of language conservation and revitalization. Language conservation and revitalization only succeeds when the community wants it and is actively involved in it. In many ways, having mobile apps for playfully engaging with traditional language and



culture at home and among friends promises to be much more important and successful than a few hours of *muatan lokal* in the curriculum of primary schools. This is not to deny that the latter are also important in language conservation, as they may help to raise the status of a language and show institutional support. But traditional languages thrive at home and in the private sphere and typically do not have a function in education or intergroup communication.

## REFERENCES

- Berez-Kroeker, Andrea L. and Ryan Henke. (2018). Language Archiving. In: Kenneth L. Rehg & Lyle Campbell (eds), *The Oxford Handbook of Endangered languages*. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190610029.013.18
- Bird, Steven and Gary Simons. (2003). Seven dimensions of portability for language documentation and description. *Language* 79:557-582.
- Bird, Steven. (2018). Designing Mobile Applications for Endangered Languages. In: Kenneth L. Rehg & Lyle Campbell (eds), *The Oxford Handbook of Endangered languages*. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190610029.013.40.
- Himmelman, Nikolaus P. (2006). Language documentation: What is it and what is it good for? In: J. Gippert, N. P. Himmelman & U. Mosel (eds), *Essentials of language documentation*. Berlin: Mouton de Gruyter, 1-30.
- Theimer, Kate. (2011). Exploring the Participatory Archives: What, Who, Where, and Why. Paper presented at the Annual Meeting of the Society of American Archivists, Chicago, Illinois, August 21–26. [www.slideshare.net/ktheimer/theimer-participatory-archivessaa-2011](http://www.slideshare.net/ktheimer/theimer-participatory-archivessaa-2011). Accessed 21 August 2018.





**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 3 Kelompok 9**

- Pembicara : Nikolaus P. Himmelmann  
Judul Makalah : “Peran Teknologi dan Kerja Sama Tim dalam Pendokumentasian Bahasa”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 10.15—11.45  
Moderator : Dr. Tengku Syarfina, M.Hum.  
Pencatat : 1. Triwulandari  
2. Winci Firdaus

**Rangkuman Penyajian Makalah**

Inti pendokumentasian bahasa terdiri atas contoh perilaku linguistik (idealnya rekaman video tentang interaksi linguistik) dan contoh pengetahuan metalinguistik (komentar penutur asli dan pandangan tentang bentuk dan praktik linguistik).

1. Dalam linguistik dokumentasi, mengacu repositori digital untuk materi dokumentasi sebagai arsip bahasa merupakan hal yang umum.
2. Pada prinsipnya ada beberapa cara untuk mengorganisasi data yang dikumpulkan untuk dokumentasi bahasa: unit dasar pengorganisasian data yang ditemukan paling bermanfaat adalah *sesi*, yaitu sepaket fail yang memuat satu peristiwa komunikasi seperti yang terlihat di dalam daftar sesi.
3. Dari daftar elemen yang harus dimasukkan dalam dokumentasi bahasa, jelas bahwa kurasi digital merupakan suatu keharusan dalam dokumentasi bahasa. Tentu saja dengan prinsip bahwa seseorang dapat menyimpan kaset rekaman dan transkripsi cetak, terjemahan, dll. secara bersamaan.
4. Kurasi digital tidak hanya penting untuk membuat dokumentasi bahasa dapat diakses oleh pihak lain yang tertarik, tetapi hal ini juga penting bagi anggota tim dokumentasi bahasa yang bekerja untuk mengannotasi dan menganalisis data.
5. Dokumentasi bahasa yang baik memerlukan partisipasi dan kolaborasi dari penutur asli secara individu dan komunitas tutur secara keseluruhan.
6. Dari banyak segi, memiliki aplikasi mobil untuk mengaitkan diri dengan bahasa dan budaya tradisional dengan cara yang menyenangkan di rumah dan di antara teman menjanjikan hal yang lebih penting dan lebih berhasil dibandingkan dengan beberapa jam materi muatan lokal di kurikulum sekolah dasar.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Mia

Instansi : FIB UGM



**Pertanyaan:**

Ketika merekam bahasa Using dan ada interferensi bahasa, bagaimana caranya untuk bisa memilih penutur dan kendala apa saja yang dihadapi ketika melakukan pendokumentasian bahasa?

**Jawaban:**

Campuran bahasa merupakan masalah besar dalam sebuah bahasa. Namun, harus disadari bahwa semua bahasa pasti mengalami proses pencampuran bahasa. Yang paling penting dalam dokumentasi bahasa adalah kita sebagai peneliti harus menjelaskan kepada penutur agar penutur dapat menggunakan bahasa aslinya, tanpa campuran.

**Penanya 2**

Nama : Masayu Gay  
Instansi : STKIP Ternate

**Pertanyaan:**

1. Unggulan aplikasi yang dibuat oleh peneliti, dibandingkan dengan aplikasi lain?
2. Aplikasi ini ke dapan akan dipakai secara umum, apakah tidak akan ada sabotase dan lain-lain?

**Jawaban:**

1. Kelebihannya adalah kemungkinan untuk kolaborasi dengan penutur lain akan lebih bagus, berbeda dengan aplikasi lain. Kelebihan lainnya dengan memakai telepon pintar masyarakat dapat berpartisipasi secara terus-menerus tanpa henti di mana pun mereka berada.
2. Sudah diantisipasi oleh teknisi dan diuji coba dengan melakukan tes agar tidak terjadi kontradiksi sehingga program lebih aman dan terjaga.

**Penanya 3**

Nama : Gifari  
Instansi : Universitas Negeri Malang

**Pertanyaan:**

Apakah telepon pintar ini dapat mendapatkan sebuah data, data suara itu harus dituliskan dalam bentuk tulisan fonetis, apakah dalam telepon pintar itu bisa mendeskripsikan sampai sejauh itu?

**Jawaban:**

Di telepon pintar belum ada aplikasi perbandingan bahasa, tetapi dalam PC dan laptop itu sudah ada dengan nama program Vowels.

**Penanya 4**

Nama : Ani  
Instansi : Universitas Sebelas Maret



**Pertanyaan:**

Bahasa-bahasa di Papua diterjemahkan dalam transkripsi yang berbeda, tidak ada dalam pengucapan baku bahasa Indonesia, bagaimana teknologi dapat mentranskripsi ucapan yang berbeda suaranya?

**Jawaban:**

Tidak semua bahasa memiliki bunyi yang sama dan dengan IPA dapat terinterpretasikan semua bunyi, tetapi secara praktik tidak bisa dipakai apalagi bila diterapkan dalam sebuah teknologi. Apabila dalam sebuah bahasa sudah ada yang bisa mentranskripsi (misalnya, ada penutur yg bisa berbahasa Indonesia) biasanya proses transkripsi akan lebih mudah, terutama untuk bunyi-bunyi yang aneh.

**Penanya 5**

Nama : Siti Hajar

Instansi : Universitas Muhamadiyah NTT

**Pertanyaan:**

Bahasa Dawan memiliki tiga dialek. Teknologi apa yang bisa digunakan untuk menghasilkan terobosan baru agar hasilnya tidak dipajang di perpustakaan, tetapi dapat dinikmati bersama?

**Jawaban:**

Kelebihan telepon pintar adalah hampir semua orang Indonesia memiliki telepon pintar sehingga kumpulan dialek lebih mudah dimasukkan ke dalam telepon pintar dan orang lain bisa melihat bahkan bisa melakukan perbandingan bahasanya.

**Isu-Isu Penting:**

1. Dokumentasi bahasa yang baik memerlukan partisipasi dan kolaborasi dari penutur asli secara individu dan komunitas tutur secara keseluruhan.
2. Penggunaan telepon pintar dalam pendokumentasian bahasa.
3. Bentuk dan hasil kajian pemetaan bahasa daerah dan sastra yang banyak dan beragam melahirkan “kesimpangsiuran” jumlah dan pengidentifikasiannya.
4. “Perdebatan” tentang jumlah dan identifikasi bahasa yang sulit dijembatani. Yang disebabkan oleh perbedaan penelaahan, teori, dan kerangka pikir yang digunakan oleh peneliti.
5. Harus adanya upaya menghidupkan atau menguatkan kembali bahasa-bahasa yang hampir punah.
6. Pendokumentasian bahasa harus disimpan dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi mutakhir.
7. Perhatian pendokumentasian sastra tertinggal jauh bila dibandingkan dengan pendokumentasian bahasa sehingga perlu dilakukan upaya dan perhatian dari Badan Bahasa untuk melakukan pemetaan sastra.



### 3. Pemetaan dan Kajian Bahasa dan Sastra Daerah: Pendokumentasian dan Pervitalisasian

#### PEMETAAN DAN KAJIAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH: Pendokumentasian dan Pervitalisasian<sup>3</sup>

**Jufrizal**

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang  
[juf\\_ely@yahoo.com](mailto:juf_ely@yahoo.com)

#### **Abstrak**

Pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah mempunyai arti penting untuk melihat sejauh mana penelitian dan hasil yang telah dicapai sehubungan dengan kajiannya. Pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah dilaporkan berdasarkan jumlah, jenis, arah, dan bentuk kajiannya. Sejauh ini, pelaporan seperti di atas sudah ada dan sudah menjadi pijakan untuk kajian-kajian lanjutan. Akan tetapi, laporan pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah yang sudah ada belum sepenuhnya berdasarkan prinsip kerja pendokumentasian dan pervitalisasian bahasa dan sastra sehingga cenderung bersifat pendaftaran saja. Penerapan prinsip kerja pendokumentasian dan pervitalisasian untuk memetakan pengkajian bahasa dan sastra daerah sangat membantu penghitungan jumlah, bentuk, pendekatan, dan hasil-hasil kajian kebahasaan dan kesastraan yang ada di Indonesia. Makalah ini membahas bagaimana pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia memerlukan landasan dan prinsip kerja pendokumentasian dan pervitalisasian untuk mendapatkan laporan yang sah dan andal. Makalah ini merupakan telaah argumentatif-teoretis berdasarkan kajian kepustakaan untuk pemetaan dan kajian bahasa dan daerah di Indonesia berdasarkan prinsip kerja pendokumentasian dan pervitalisasian. Dengan demikian, metode penyediaan dan pengkajian data bersifat studi kepustakaan dan penjelasan ilmiah-argumentatif.

**Kata-kata kunci:** *pemetaan, bahasa-sastra daerah, dokumentasi, revitalisasi*

#### **Abstract**

*The mapping and studies on local languages and literatures have important roles to see to what extends the description of researches and results gained dealing with the studies on them. The mapping and researches on local languages and literature can be reported in the numbers, types, contents, and forms of the researches and their results. The reports in such forms, so far, have been available and practically used as the bases for further studies. The mapping and research reports, however, have not principally based on the principles of documenting and revitalizing so that they were merely as the lists of reports. The application of the principles of documenting and revitalizing in order to map the studies of local languages and literatures may highly help the calculating of numbers and determining the forms, models, approaches, and the results of studies in Indonesia. This paper discusses how the mapping and researches on local languages and literature in Indonesia need to use the working principles of documenting and revitalizing in gaining valid*

---

<sup>3</sup> Makalah disajikan pada Kongres Bahasa Indonesia XI-tahun 2018 di Jakarta, 28 – 31 Oktober 2018



*and reliable reports. This paper is the theoretical-argumentative explanation of library study related to mapping and researches on local languages and literature in Indonesia related to the application of working principles of documentation and revitalization. Therefore, methods of data collection and analysis are those of library studies and scientific-argumentative explanations.*

**Keywords:** *mapping, local language and literature, documentation, revitalization*

## **PENDAHULUAN**

Pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia telah melahirkan jumlah dan berbagai bentuk penelitian beserta hasil-hasilnya. Pemetaan kajian kebahasaan dan sastra daerah Nusantara sejauh ini dipantau berdasarkan “laporan-laporan” yang diperoleh oleh lembaga bahasa (pusat) yang berasal dari para peneliti dan pengkaji bahasa dari perguruan tinggi, peneliti mandiri, lembaga-lembaga bahasa di daerah, dan para peneliti asing yang menerbitkan temuan pada jurnal dan terbitan internasional.

Pemetaan kajian adalah bagian dari upaya penentuan jumlah, jenis, arah, dan bentuk kajian yang sudah dan (yang akan) dilakukan. Upaya ini mempunyai arti penting untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan utuh, sah, dan andal sehingga dapat dijadikan pijakan dan dasar pernyataan ilmiah perihal keadaan kebahasaan dan kesusastraan di negeri aneka bahasa dan aneka budaya ini.

Menarik dan menantang untuk diperhatikan apa yang dikemukakan oleh Mahsun melalui makalah yang disajikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober–1 November 2008. Menurut Mahsun, meskipun upaya pemetaan dan identifikasi bahasa dan kebahasaan (termasuk kajian sastra) di Indonesia sudah cukup lama dan banyak dilakukan dan menghasilkan temuan yang cukup beragam pula, tidak jarang semua itu menimbulkan “kesimpangsiuran” informasi tentang jumlah dan identifikasi bahasa-bahasa yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Di sisi lain, “kesimpangsiuran” tentang jumlah dan identifikasi hasil yang dicapai tersebut juga terjadi pada kajian sastra di negeri ini. Menurut Mahsun (2008), faktor utama yang menyebabkan keberagaman dan “kesimpangsiuran” jumlah dan pengindentifikasian bahasa (termasuk sastra: penulis) tersebut adalah keberbedaan dalam penggunaan metode penelitian dan pengkajian yang digunakan. Berdasarkan berbagai kajian kepustakaan atas beberapa kajian linguistik dan sastra yang ada, selain keberbedaan metodologi penelitian dan pengkajian data, penyebab lain adalah keberbedaan landasan filosofis-teoretis dan kerangka kerja, tujuan, dan bentuk kajian. Sering dijumpai temuan dan simpulan penelitian yang disampaikan melalui publikasi ilmiah dan pemaparan melalui kongres dan seminar perbedaan jumlah dan identifikasi bahasa dan sastra di Indonesia menjadi perdebatan “berlarut-larut” dan sulit menemukan titik temu yang sama di kalangan ilmuwan dan pemerhati bahasa dan sastra daerah. Inilah di antara masalah pemetaan dan pengkajian bahasa dan sastra Indonesia yang perlu “diatasi” untuk memperoleh pemetaan yang sah dan andal.

Berdasarkan laporan penelitian dan publikasi tentang jumlah bahasa di Indonesia dalam rentang waktu 1951 sampai 2018, misalnya, didapati jumlah yang berbeda (lihat Mahsun, 2008; Jufrizal, 2012; Klamer, 2018). Dalam peta bahasa yang dibuat oleh Esser (1951) disebutkan ada 200 bahasa di Indonesia. Pada tahun 1960, Salzner menyatakan hanya ada 96 bahasa di Indonesia. Sementara itu, Lembaga Bahasa Nasional (tahun 1972) mencatat ada 418 bahasa daerah.



Perkembangan pemetaan bahasa selanjutnya menyebutkan bahwa ada 672 bahasa daerah seperti yang dikemukakan oleh Grimes (1988). Tim peneliti yang tergabung dalam The Summer Institute of Linguistics (2006) menyatakan jumlah lain, yaitu ada 742 bahasa di negeri ini. Sementara itu, etnolog, Simons dan Fenning, (2018) yang dikutip Klamer (2018) menyebut angka 707 untuk menunjukkan jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia.

Adanya perbedaan jumlah bahasa daerah ini adalah bagian dari masih bermasalahnya pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia. Mahsun (2008) menyebut bahwa faktor utama yang menyebabkan adanya perbedaan itu adalah keberbedaan penggunaan metode, baik metode penelitian maupun metode pengkajian data yang sudah dikumpul. Selain itu, perbedaan landasan teoretis-filosofis, bentuk, dan tujuan pengkajian terhadap bahasa-bahasa daerah juga turut menjadi penyebab adanya perbedaan peta bahasa tersebut. Hal serupa dipercayai juga terjadi pada pemetaan dan pengkajian sastra yang tidak dapat dipisahkan dari pengkajian bahasa. Penyebab lain adalah belum meratanya “jangkauan” pemetaan dan pengkajian bahasa dan sastra daerah untuk seluruh bahasa dan sastra daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tentu saja ini adalah tantangan dan tanggung jawab para ilmuwan dan peneliti bahasa dan sastra daerah di negeri ini.

Pokok bahasan tulisan mengenai pemetaan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia yang sudah ada, sejauh ini, lebih banyak dikaitkan dengan penelitian dialektologi, linguistik historis-bandingan, dan pendaftaran serta penerbitan karya sastra yang ada di Indonesia. Selain dengan cara yang sudah dilaksanakan dan berjalan tersebut, pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah dapat dilaksanakan melalui kajian pendokumentasian dan perevitalisasian (*documentation and revitalization*).

Penelitian dan kajian dalam bentuk dokumentasi dan revitalisasi bahasa telah mulai dikenal dan berjalan di Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Kerangka dan model kajian dokumentasi dan revitalisasi tidak hanya digunakan untuk pemetaan dan penelitian bahasa, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk pemetaan dan penelitian sastra. Oleh karena itu, adalah suatu gagasan yang baik untuk menjadikan kerangka kerja penelitian dokumentasi dan revitalisasi sebagai bagian dari upaya pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia. Berkenaan dengan itu, gagasan yang disampaikan melalui makalah ini adalah bagaimana perihal pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah dilihat dari kerangka kerja penelitian dokumentasi (*documentation*) dan revitalisasi (*revitalization*).

Penerapan prinsip kerja pendokumentasian dan perevitalisasian untuk memetakan pengkajian bahasa dan sastra daerah sangat membantu penghitungan jumlah, bentuk, pendekatan, dan hasil-hasil kajian kebahasaan dan kesastraan yang ada di Indonesia secara sah dan andal. Ada dua pertanyaan yang menjadi landasan pembahasan makalah ini, yaitu (i) mengapa dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa diperlukan dalam upaya pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia serta (ii) bagaimana prinsip dan prosedur kerja penelitian dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa dapat dilaksanakan untuk mendapatkan pemetaan dan laporan jumlah dan bentuk kajian bahasa dan sastra secara lebih tepat dan berterima. Makalah ini merupakan telaah argumentatif-teoretis berdasarkan kajian kepustakaan untuk pemetaan dan kajian bahasa dan daerah di Indonesia berdasarkan prinsip kerja pendokumentasian dan perevitalisasian.



## LANDASAN TEORI

Pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah merupakan kerja ilmiah kebahasaan dan kesusastraan yang berkaitan dengan kebijakan bahasa (*language policy*) dan perencanaan bahasa (*language planning*). Kebijakan bahasa dan perencanaan bahasa mempunyai arti penting untuk membangun dan memperkuat suasana kebahasaan dan berbudaya yang kondusif di negara aneka bahasa dan aneka budaya, seperti Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa tanpa kebijakan dan politik bahasa yang baik berbagai masalah kebahasaan dan kesusastraan dapat muncul dan jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan masalah sosial-budaya lain yang boleh jadi membahayakan negara-bangsa. Pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah yang baik melahirkan laporan dan temuan penelitian yang menggambarkan keadaan dan suasana kebahasaan dan kesusastraan di Indonesia. Selain bermanfaat untuk ilmu pengetahuan (linguistik dan sastra), pemetaan tersebut juga sangat bermafaat untuk pembinaan dan pengembangan perangkat-perangkat sosial-budaya masyarakat di seluruh Indonesia.

Bahasa dan karya sastra yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adalah fenomena sosial-budaya yang “hidup”; bahasa dan sastra berkembang dan berubah sejalan dengan perkembangan manusia pemilikinya. Tidak ada bahasa dan karya sastra manusia yang “tetap” tanpa perubahan. Itu semua disebabkan oleh alam dan semua sisi kehidupan manusia yang selalu berubah. Malah bahasa dan karya sastra adalah bagian dari “milik” manusia yang paling rentan terhadap perubahan (lihat Appel and Muysken, 1988; Bonvillain, 1997; Schendle, 2001). Akibatnya, adanya pergeseran dan perubahan bahasa dan sastra, termasuk perubahan jumlah dan identifikasinya, menjadi hal yang wajar sekaligus perlu disikapi secara ilmiah oleh ilmuwan bahasa dan sastra.

Seperti dikemukakan oleh Mahsun (2008) bahwa ihwal pemetaan dan identifikasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia telah berjalan cukup lama. Teeuw, seorang sarjana berkebangsaan Belanda, dapat dikatakan telah memulai proyek pemetaan bahasa daerah di Indonesia pada tahun 1951 dengan mengambil bahasa Sasak sebagai objek kajian. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menggunakan model pemetaan Teeuw dan analisis dialektologis terhadap berbagai bahasa di Nusantara. Hasilnya, diterbitkan berbagai laporan penelitian kebahasaan dan sastra daerah yang cukup banyak dan dijadikan dasar penghitungan jumlah dan identifikasi bahasa dan sastra Indonesia.

Perbedaan metodologi, dasar teoretis-filosofis, bentuk kajian yang dilakukan, dan belum meratanya pengkajian untuk seluruh wilayah Indonesia menyebabkan pelaporan jumlah dan indentifikasi bahasa dan karya sastra cenderung berubah-ubah. Peta bahasa yang diterbitkan oleh Esser (1951) dan Alisjahbana (1954), Salzner (1960), Lembaga Bahasa Nasional (1972), Grimes (1988), The Summer Institute of Linguistics (2006), dan Simons dan Fenning (2018) menyebutkan jumlah bahasa daerah di Indonesia yang tidak sama.

Pemetaan dan identifikasi sastra daerah di Indonesia diperkirakan juga masih belum “kokoh” karena dilakukan dengan metodologi dan dasar pengkajian yang berbeda. Tidak jarang terjadi perdebatan yang lama untuk mengidentifikasi apakah sebuah naskah sastra masuk ke dalam karya sastra yang berbeda atau bukan. Jumlah pasti karya sastra yang ada di Indonesia memang cukup sulit menyebutnya karena begitu banyaknya ciri pembeda dan stilistika yang dimiliki oleh satu karya sastra dari satu suku bangsa atau kelompok masyarakat. Ciri-ciri pembeda dan



perihal stilistika karya sastra amat sulit dirumuskan karena menyangkut rasa dan penafsiran yang juga tidak kasat mata. Apalagi arus perubahan yang semakin cepat dan dinamika kehidupan manusia yang “mendunia” boleh jadi penyebab lain sulitnya memetakan kajian sastra daerah secara pasti, termasuk terjadinya perbedaan jumlah bahasa yang diidentifikasi oleh peneliti mutakhir. Meskipun demikian, ilmuwan dan peneliti bahasa dan sastra daerah harus terus berbuat dan menemukan metode pemetaan yang dapat berterima secara ilmiah dan sosial. Ini jelas menjadi tantangan dan bagian dari kesungguhan kerja ilmiah di bidang bahasa dan sastra.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pemetaan dan kajian bahasa daerah di Indonesia sudah dilakukan secara dialektologis, historis-bandungan, sociolinguistik, dan melalui perbaikan metodologis (lihat tawaran sketsa teoretis oleh Gumono (2010)). Sementara itu, pemetaan kajian sastra lebih banyak didominasi oleh penerbitan buku-buku sastra dan penelitian-penelitian perorangan atau kelompok pada lembaga sastra di berbagai daerah melalui pendekatan tertentu. Laporan dan terbitan hasil kajian belum tercatat secara pasti secara nasional sehingga sulit memetakannya secara kuantitatif. Sesungguhnya, tidak ada yang salah dari upaya pemetaan yang sudah dilakukan. Hanya saja, perlu ada terobosan “baru” yang dapat mengatasi persoalan pemetaan kajian bahasa dan sastra daerah sejauh ini.

Agaknya, cukup beralasan untuk “mengusulkan” kerangka kerja penelitian lain atas bahasa dan sastra daerah untuk mendukung dan memperkuat upaya pemetaannya secara nasional. Kerangka dan prinsip kerja dokumentasi dan revitalisasi bahasa adalah salah satu pilihan, dalam hal ini. Meskipun penyebutannya adalah dokumentasi dan revitalisasi bahasa, kerangka dan prinsip kerjanya dapat digunakan untuk pemetaan dan kajian sastra. Oleh karena itu, penyebutan dokumentasi dan revitalisasi bahasa pada makalah ini juga mencakup dokumentasi dan revitalisasi sastra, dalam hal ini sastra daerah di Indonesia. Pendokumentasian dan perevitalisasian bahasa dan sastra dapat dilakukan beriringan dengan kerangka kerja yang sama dengan melakukan beberapa penyesuaian kecil.

Menurut Collins (2018), dalam 20 tahun terakhir pendokumentasian bahasa-bahasa terancam (punah) telah muncul sebagai subcabang baru linguistik dengan prioritas dan prosedur mutakhir tersendiri (lihat juga Himmelmann dalam Gippert dkk. (ed.), 2006). Dukungan berbagai sumber dana, termasuk Volkswagen Stiftung, Arcadia Fund, dan Program Pendokumentasian Bahasa-Bahasa Terancam Punah, telah melahirkan temuan dan materi capaian bermutu tinggi. Sering pula proyek pendokumentasian bahasa dihubungkan dengan revitalisasi bahasa yang juga turut menjadi bagian dari pemetaan bahasa dan sastra.

Dokumentasi bahasa, secara mendasar, adalah rekaman bahasa abadi dan serbaguna (Himmelmann dalam Gippert dkk. (ed.), 2006, hlm.1). Definisi ini memerlukan penjelasan lebih lanjut karena masih sangat umum. Istilah pertama yang mesti dijelaskan adalah rekaman bahasa. Rekaman bahasa merujuk ke rekaman semua lapisan bentuk bahasa (bunyi, kata, frasa, kalimat, teks), baik itu dialek, subdialek, atau bahkan bahasa yang dijumpai langsung di tengah masyarakat penuturnya. Dalam hal ini, termasuk karya sastra, baik dalam bentuk rekaman audio maupun tulis. Sementara itu, abadi berarti terekam secara baik dalam bentuk data keras (rekaman audio dan/atau tulis) dan serbaguna mempunyai pengertian bahwa rekaman tersebut dapat menunjukkan dan dimanfaatkan untuk mencermati berbagai





aspek makna, pemakaian, dan nilai bahasa terekam tersebut (lihat Himmelmann dalam Gippert dkk. (ed.), 2006).

Berdasarkan titik pandang linguistik, Himmelmann (dalam Gippert dkk. (ed.), 2006) menjelaskan ada tiga alasan mendasar mengapa dokumentasi bahasa (dan karya sastra) penting adanya. Tiga alasan itu berkenaan dengan penguatan dan perluasan bagi bidang ilmu yang mendasari kajiannya dengan data empiris, terutama bagi cabang-cabang linguistik dan bidang ilmu terkait yang secara ketat mengkaji dan menyimpulkan data dari bahasa yang masyarakat penuturnya kurang dikenal, seperti kajian deskriptif linguistik, tipologi linguistik, dan antropologi kognitif. Alasan utama perlunya dokumentasi bahasa adalah kenyataan bahwa sejumlah substansi dan fitur bahasa yang masih dituturkan hari ini terancam punah. Jika ini terjadi, mustahil sebuah bahasa yang sudah punah dapat diketahui lagi data dan informasi kebahasaan lainnya melalui penutur asli. Inilah perlunya pendokumentasian bahasa (dan sastra) sehingga masih ada rekaman data yang boleh dan mungkin ditelaah. Alasan kedua adalah bahwa rekaman keras (audio dan tulis) tersebut dapat digunakan oleh penelitian bidang lain, seperti ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Rekaman bahasa (dan karya sastra) akan sangat membantu pelajaran sejarah dan perkembangan peradaban manusia melalui penelusuran bahasa. Alasan ketiga adalah bahwa penyediaan arsip terbuka untuk data utama bahasa sangat bermanfaat untuk melaksanakan dan merumuskan analisis bahasa (termasuk karya sastra) yang berterima.

Berdasarkan alasan-alasan mendasar akan pentingnya penelitian dokumentasi bahasa, seperti yang dikemukakan oleh Himmelmann (2006) di atas, ada satu manfaat lain yang dapat diturunkan dari rangkaian alasan-alasan tersebut, yaitu bahwa penelitian dokumentasi bahasa (pendokumentasian bahasa) sangat membantu untuk melakukan pemetaan kajian bahasa, termasuk kajian sastra. Dokumentasi dan arsip yang baik dari berbagai bentuk dan pemakaian bahasa dapat menjadi “catatan” dan “dasar” pemetaan dan kajian bahasa dan sastra secara beriringan. Dengan adanya rekaman dan arsip melalui penelitian dokumentasi bahasa yang dilaksanakan secara tertata dan terpantau, ilmuwan bahasa dan sastra bersama pengambil kebijakan di bidang bahasa dan sastra akan dapat mencatat jumlah, bentuk, arah, dan lanjutan kajian bahasa dan sastra di kawasan tertentu sehingga dapat mewujudkan pemetaan yang berterima.

Selain dapat dikerangkai oleh penelitian dokumentasi bahasa, pemetaan dan kajian bahasa dan sastra dapat pula dikerangkai oleh bentuk lain penelitian bahasa (dan sastra), yaitu revitalisasi bahasa. Menurut Collins (2018), proyek-proyek dan program dokumentasi bahasa sering dikaitkan dengan aspirasi revitalisasi bahasa. Dalam hal ini, Austin seperti dikutip oleh Collins (2018) menyatakan, “... ada kemungkinan bagi dokumentasi bahasa untuk mengadopsi pendekatan kajian bahasa yang lebih bersifat sosiolinguistik dan penelitian linguistik, termasuk kaitan lebih baiknya dengan revitalisasi bahasa.”

Hal tersebut berarti bahwa penelitian dokumentasi bahasa dapat beriringan (dan berlanjut) dengan penelitian revitalisasi bahasa (dan sastra) dengan melakukan penempatan dan penyesuaian pada hal-hal yang diperlukan. Berdasarkan sebutannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kerja dokumentasi bahasa berupaya untuk merekam fitur-fitur bahasa secara apa adanya dan menyimpannya secara baik untuk dapat digunakan sebagai bahan analisis linguistik dan/atau sastra lainnya. Dengan demikian, bahasa-bahasa yang hidup pada masa perekaman dapat



“diawetkan” dan jika pada saatnya nanti bahasa tersebut “punah” masih ada rekaman abadi yang dapat digunakan serbaguna. Sementara itu, revitalisasi bahasa mempunyai pengertian “menghidupkan” dan “menguatkan” kembali bahasa-bahasa yang mulai rendah keterpakaianya dan “melemah” fungsi-fungsi sosial-budayanya. Langkah kerjanya boleh jadi sama-sama dimulai dengan perekaman. Namun, untuk revitalisasi bahasa ditambah dengan upaya penguatan sehingga bahasa yang sudah hampir hilang itu tetap bertahan hidup. Seperti diungkapkan oleh Collins (2018), sejak akhir tahun 2015 pemuda-pemuda Indonesia dan Malaysia yang bekerja sama dengan beberapa orang mahasiswa meluncurkan dua proyek yang tidak berfokus pada dokumentasi bahasa, tetapi lebih pada revitalisasi bahasa (lihat juga Himmelmann; Mosel; keduanya dalam Gippert dkk. (ed.), 2006).

Dengan demikian, revitalisasi bahasa (*language revitalization*), meskipun dapat dikaitkan dengan dokumentasi bahasa, berbeda dari dokumentasi bahasa (*language documentation*). Sebenarnya, penelitian bahasa yang sudah dilakukan sejak pertengahan abad ke-20 secara tidak langsung adalah perekaman data bahasa yang boleh dikatakan sebagai dokumentasi bahasa. Pada akhir abad ke-20, pendokumentasian tersebut sudah mengarah pada pengumpulan data untuk membuat korpus linguistik bahasa yang diteliti yang difokuskan untuk menghasilkan tata bahasa dan leksikon, mungkin juga sebagian berkenaan dengan pilahan-pilahan teks. Dokumentasi bahasa mutakhir abad ke-20 sudah menghasilkan sejumlah besar rekaman bahan-bahan kebahasaan dengan berbagai fitur dan nilai bahasa, baik untuk kajian linguistik maupun sastra. Ini semua dapat dilakukan dengan bantuan teknologi digital yang semakin hebat, teliti, dan cepat. Meskipun demikian, semua rekaman yang diperoleh masih bersifat deskripsi bahasa yang belum mendapat “sentuhan” analisis mendalam (lihat Austin; Haviland; keduanya dalam Gippert dkk. (ed.), 2006); Collins, 2018).

Dokumentasi bahasa abad ke-21 sudah lebih maju lagi. Dengan bantuan teknologi digital yang terus berkembang pesat, dokumentasi bahasa mempunyai deskripsi baru pula, seperti dirumuskan oleh Departemen Linguistik Universitas Hawaii, sebagaimana dikutip oleh Collins (2018, hlm. 13) berikut ini.

“Bekerja dengan masyarakat asli, ilmuwan bahasa menciptakan audio-visual dokumentasi bahasa sebagaimana diujarkan oleh berbagai lapisan masyarakat dalam konteks tertentu. Dokumentasi ini berfungsi sebagai rekaman linguistik abadi, menyediakan tulang punggung bagi analisis ilmiah dan juga sebagai upaya untuk merevitalisasi and mempertahankan warisan bahasa suatu masyarakat.”

Menurut Collins (2018), berdasarkan definisi dokumentasi bahasa abad ke-21 di atas, ada beberapa fitur pendokumentasian bahasa yang dapat disoroti. Pertama, dokumentasi mutakhir menekankan kerja sama dekat dengan masyarakat penutur asli bahasa tersebut. Kedua, dokumentasi terutama yang berkenaan dengan pembuatan rekaman audio-visual bermutu tinggi. Ketiga, perbedaan register dan keberagaman bahasa mesti dicerminkan dengan adanya kerja sama dengan beragam penutur dalam masyarakat bahasa itu. Tiga fitur ini dapat dikatakan sebagai prinsip konseptual dari dokumentasi bahasa, yang boleh juga dikaitkan dengan dokumentasi karya sastra. Namun, Collins menegaskan perlunya dipikirkan prosedur kerja dokumentasi bahasa. Menurutnya, prosedur dokumentasi bahasa mutakhir itu adalah

(i) perekaman,



- (ii) transkripsi,
- (iii) anotasi,
- (iv) penerjemahan (bahasa komunikasi yang lebih luas),
- (v) pengarsipan, dan
- (vi) penyebarluasan (distribusi).

Perekaman, transkripsi, anotasi, dan penerjemahan adalah langkah kerja yang lazim adanya pada dokumentasi bahasa abad ke-20. Namun, dokumentasi abad ke-21, dengan bantuan teknologi perekaman digital audio-visual yang canggih, memberi peningkatan pada pengarsipan dan penyebarluasan hasil-hasil yang dicapai secara elektronik. Ini merupakan kemajuan yang mesti dimanfaatkan untuk pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia.

Pendokumentasian melalui kerangka kerja dokumentasi bahasa, secara umum, masih bersifat rekaman tetap dan abadi yang tersimpan dalam arsip dan dapat dilihat melalui penjelajahan internet dengan situs tertentu. Dokumentasi ini berfungsi sebagai rekaman linguistik abadi, menyediakan tulang punggung untuk analisis linguistik, dan juga upaya untuk merevitalisasi dan mempertahankan bahasa warisan suatu masyarakat. Dengan kata lain, dokumentasi bahasa adalah untuk ilmuwan bahasa dan mungkin juga bermanfaat untuk upaya pemertahanan bahasa oleh masyarakat penuturnya melalui revitalisasi bahasa mereka. Oleh karena itu, revitalisasi bahasa adalah pikiran kedua atau pemisahan dari pengembangan dokumentasi bahasa. Hal ini berarti bahwa revitalisasi bahasa berbeda dari dokumentasi bahasa; ketika kita mendukung usaha pendokumentasian bahasa, kita mesti menggali revitalisasi bahasa sebagai bagian terpisah, pisahan yang menempatkan revitalisasi datang lebih dahulu dan dokumentasi adalah hasil kedua (Collins, 2018).

Sebagaimana sudah disinggung pada bagian terdahulu, prinsip kerja dokumentasi bahasa dengan langkah-langkah kerjanya yang mutakhir dapat secara berjenjang, jelas, dan tepat memberi laporan perihal jumlah, arah, dan bentuk kajian bahasa dan sastra yang sudah dan akan dilakukan. Ini sangat penting untuk mendapatkan peta dan kajian bahasa dan sastra di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Tanpa kerja tertata dan tercatat, berapa pun dan apa pun hasil penelitian dan kajian yang sudah dilakukan dan dicapai akan sangat sulit mendapat pemetaan yang utuh dan berterima. Pemetaan kajian bahasa dan sastra yang sudah tercatat secara berjenjang, mulai dari tingkat operasional paling rendah sampai jenjang paling tinggi (Pusat Bahasa/Badan Bahasa), akan sangat berarti lagi jika diikuti dengan penelitian dan pengkajian revitalisasi bahasa, atau sebaliknya. Untuk bahasa-bahasa yang (sangat) terancam (punah), dokumentasi bahasa perlu segera dilakukan. Sementara itu, untuk bahasa-bahasa yang sudah “melemah” fungsi sosial-budayanya, perlu dilakukan upaya perevitalisasian.

## **METODE PENYEDIAAN DAN PENGKAJIAN DATA**

Makalah ini merupakan hasil kajian teoretis-argumentatif berdasarkan telaah ilmiah atas teori dan hasil-hasil kajian ilmuwan yang berkenaan dengan pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah yang dikaitkan dengan penelitian linguistik yang bersifat dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa. Meskipun dalam makalah ini sebutan bahasa lebih sering muncul, bahasan teoretis dan uraiannya juga dapat dikaitkan dengan karya sastra. Berkenaan dengan itu, metode penyediaan data yang disajikan dan analisisnya bersifat studi pustaka dan telaah argumentatif-ilmiah



sesuai dengan batasan penelaahan. Sajian data dan analisisnya diarahkan untuk memberi gambaran perihal pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah yang dapat dilakukan melalui penelitian dokumentasi dan revitalisasi bahasa. Dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa adalah model penelitian dan pengkajian bahasa yang lebih diarahkan untuk merekam bahasa-bahasa yang masih ada dan melakukan upaya penguatannya agar bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat penuturnya dapat terekam dan tersimpan dengan baik. Upaya ini menjadi penting artinya sebagai upaya pemetaan penelitian bahasa dan sastra yang sudah dan yang akan dilakukan sehingga ada catatan rapi tentang jumlah, bentuk, arah, dan laporan penelitian secara melembaga dan berterima.

## **PEMBAHASAN**

Bermula dari laporan jumlah bahasa daerah di Indonesia yang terus berubah dan sulit membuat pernyataan kuat untuk itu, pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah tersebut menjadi persoalan yang memerlukan penanganan. Makalah ini tidak membahas perihal sifat dan sejauh mana pemetaan bahasa dan sastra yang sudah ada sejauh ini. Namun, makalah ini menawarkan salah satu cara yang dianggap baik untuk melakukan dan membuat pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah secara luas dan tertata. Cara yang diusulkan adalah melalui penelitian dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa. Dokumentasi bahasa adalah salah satu subcabang penelitian linguistik dengan tujuan utama mendapat rekaman abadi dan penyimpanan data bahasa secara sistematis, rapi, dan aman. Pendokumentasian bahasa sangat perlu dilakukan untuk kawasan pemakaian aneka bahasa dan sastra yang sangat luas seperti di Indonesia. Lebih-lebih lagi, dokumentasi bahasa sangat penting artinya bagi bahasa-bahasa kecil dan terancam (punah), seperti sejumlah bahasa yang ada di kawasan timur Indonesia. Untuk bahasa-bahasa yang masih kuat, tetapi sudah mengalami penggerusan, pergeseran, atau perubahan kecil karena adanya dominasi bahasa asing, upaya perevitalisasian melalui penelitian revitalisasi bahasa sangat bermanfaat.

Pertanyaan pokok pertama yang harus dijawab melalui makalah ini adalah mengapa dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa diperlukan dalam upaya pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia. Jawaban untuk pertanyaan ini memerlukan tinjauan teoretis dan informasi peta penelitian tentang bahasa dan sastra daerah secara umum. Sejauh ini, pemetaan kajian bahasa dan sastra daerah, sekurang-kurangnya, mempunyai tiga masalah: (i) belum ada pemetaan pasti tentang jumlah, bentuk, dan arah kajian yang sudah dan yang akan dilakukan; (ii) belum meratanya jumlah dan mutu penelitian bahasa dan sastra daerah untuk menjangkau kawasan pemakaiannya yang sangat luas; dan (iii) adanya perbedaan metodologi dan landasan teoretis-filosofis pengkajian bahasa dan sastra. Ketiga masalah ini sudah menjadi pemikiran dan bahan diskusi di kalangan ilmuwan dan peneliti bahasa dan sastra. Berbagai jawaban dan jalan keluar sudah dikemukakan oleh para ahli (lihat, misalnya, Gumono, 2002; Mahsun, 2008; Mahayana, tanpa tahun). Gumono (2002) menawarkan bahwa untuk mendapatkan pemetaan bahasa dan kebahasaan (dan sastra) daerah di Indonesia diperlukan sketsa pemetaan kebahasaan yang mencakup (i) objek kajian; (ii) teori yang digunakan; (iii) hasil baru yang diperoleh (teoretis atau praktis); dan (iv) sumber daya penelitian.



Upaya pemetaan lengkap penelitian kebahasaan di Indonesia, menurut Gumono (2002), sudah mendesak untuk dilakukan agar diperoleh informasi perkembangan penelitian kebahasaan di negeri aneka bahasa ini. Pemetaan itu juga penting untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu bahasa, pendekatan, dan teori yang digunakan. Selain dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan kebahasaan yang sebenarnya, pemetaan dapat juga dijadikan sebagai sumber informasi dalam kebijakan penelitian kebahasaan.

Sketsa yang dikemukakan Gumono (2018) dan pentingnya pemetaan penelitian kebahasaan di Indonesia memberi arah tentang perlu menjelaskan objek kajian, teori, hasil-hasil yang dicapai, dan sumber daya penelitian seperti kemampuan dan pengetahuan metodologis peneliti dan pemahaman teori yang dimilikinya. Tawaran ini mempunyai arti penting secara teoretis dan sangat diperlukan untuk memperkuat “modal internal” peneliti bahasa. Bahasan yang dipaparkan lebih menitikberatkan pada upaya penelitian yang sudah banyak dan lazim dilakukan oleh peneliti dan pengkaji bahasa secara perseorangan dan kelompok. Akan tetapi, sketsa ini belum secara tegas menggambarkan bagaimana penelitian bahasa dan sastra daerah di Indonesia tertata dan tercatat dengan baik.

Mahsun (2008) berpendapat bahwa masalah pemetaan dan pengidentifikasian penelitian bahasa di Indonesia disebabkan oleh perbedaan metodologi penelitian dan pengkajian data. Hasil-hasil penelitian dan penghitungan jumlah bahasa daerah selalu berbeda dan untuk menyamakan “pendapat” sering sulit dilakukan. Oleh karena itu, menurut Mahsun, perlu dilakukan pembenahan aspek metodologis dan memperbaiki langkah-langkah pelaksanaan dan analisis penelitian yang didasarkan pada penelitian dialektologis dan linguistik historis bandingan.

Langkah-langkah penerapan metode penelitian yang diajukan adalah (i) menghimpun data dari keseluruhan daerah pengamatan dalam tabel yang disebut tabulasi tahap I atau data verba I (peta tahap I); (ii) melakukan analisis sinkronis (peta tahap II); (iii) melakukan penghitungan dialektometri tahap I dan II; dan (iv) menafsirkan hasil penghitungan dialektometri untuk menentukan pengelompokan pemakai atau kelompok pemakai bahasa atau dialek tertentu. Mahsun, pada bagian akhir makalahnya, menegaskan bahwa ilmuwan dan peneliti bahasa di Indonesia masih memerlukan waktu lagi untuk menentukan jumlah bahasa yang terdapat di Indonesia. Perlu dipikirkan model pendekatan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan untuk menjejaki relasi kekerabatan antarbahasa-bahasa di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar kesimpangsiuran yang ada perihal jumlah dan identifikasi bahasa (dan sastra) yang terjadi dapat diatasi.

Pemetaan sastra Indonesia (dan sastra daerah di Indonesia) juga perlu mendapat pembenahan. Menurut Mahayana (tanpa tahun), pemetaan sastra Indonesia mestinya tidak lagi terpusat pada berbagai kegiatan penerbitan buku-buku sastra. Pemetaan sastra Indonesia (dan daerah) yang hanya bersifat seperti itu belum menggali potensi nilai sosial-budaya yang “tersimpan” dalam karya sastra. Selain itu, pemetaan karya sastra sudah seharusnya memperhatikan dinamika sastra dan perubahan antarwaktu disertai penggalan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, pemetaan penelitian dan kajian sastra daerah memerlukan pembenahan untuk mendapatkan hasil dan laporan yang tercatat dan berterima.

Berkenaan dengan hal yang dikemukakan di atas, sebagai lanjutan dan penguatan dari tawaran yang sudah terdahulu, makalah ini menawarkan pendekatan dan metode penelitian dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa (dan sastra)



untuk digunakan dan diprogramkan secara nasional, baik untuk penelitian bidang bahasa maupun sastra daerah. Mengapa penelitian dan pola kerja pengkajian berdasarkan dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa diperlukan untuk pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia? Ada tiga alasan penting mengapa dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa perlu digunakan untuk pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah tersebut. Pertama, jumlah bahasa dan sastra daerah di Indonesia sangat banyak, bahkan ada beberapa di antaranya sudah terancam (punah) sehingga diperlukan perekaman dan pencatatan awal secara menyeluruh berdasarkan kriteria kebahasaan dan kesusastraan yang berterima. Pencatatan jumlah identifikasi bahasa dan sastra bukan hanya pencatatan acak dan perkiraan teoretis saja; pencatatan dan identifikasi memerlukan data empiris yang banyak dan model penelaahan yang jelas. Dalam hal ini, penelitian dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa dapat memenuhi harapan untuk dapat mendapatkan data yang sah dan penelaahan yang berterima. Penelitian bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan melalui prinsip kerja dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa akan dapat menghimpun data awal yang terekam baik untuk semua bahasa dan karya sastra yang tersebar di seluruh Indonesia.

Alasan kedua adalah bahwa kawasan penyebaran pemakaian bahasa dan sastra daerah sangat luas dan beragam. Jika penelitian yang dilaksanakan tidak berkesinambungan dan hanya sebagian-sebagian, pemetaan dan peidentifikasiannya sulit mendapat hasil yang sama dan berterima. Dalam hal ini, untuk mencapai kawasan yang luas dengan keberagaman bentang wilayah dan faktor sosial-budaya yang ada diperlukan model kerja penelitian yang dapat merekam data awal yang banyak dan sah dari seluruh kawasan pemakaian bahasa dan sastra. Ini dapat dijawab oleh penelitian dokumentasi bahasa, terutama untuk bahasa-bahasa kecil dan terancam (punah), dan revitalisasi bahasa untuk bahasa-bahasa yang sudah mengalami penurunan daya guna secara sosial-budaya. Sebagaimana disinggung pada bagian terdahulu, perekaman data secara menyeluruh dan penyimpanannya secara rapi sehingga dapat digunakan untuk telaah kebahasaan dan kesusastraan adalah tujuan utama dokumentasi bahasa. Perekaman akan dapat menjangkau kawasan yang luas seperti yang ada di Indonesia.

Alasan ketiga adalah perekaman data awal dan menyeluruh untuk seluruh bahasa dan sastra yang ada di Indonesia tidak terikat teori dan metodologi tertentu yang sering menimbulkan pandangan berbeda. Dengan cara ini, perekaman data dapat lebih cepat dan menjangkau kawasan luas dalam waktu yang lebih singkat. Apalagi tim peneliti dapat bekerja sama dengan penutur asli dengan berbagai latar belakang sosial-budaya yang dapat menggambarkan pemakaian bahasa beserta nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra yang direkam. Tidak dapat dimungkiri bahwa pelaksanaan penelitian untuk pemetaan bahasa dan sastra daerah memakan waktu, biaya, dan sumber daya manusia yang sangat banyak mengingat luas dan beragamnya kawasan pemakaian bahasa dan sastra yang berbeda-beda. Dalam hal ini, pelaksanaan prinsip dan prosedur dokumentasi bahasa dasar dan mutakhir disertai revitalisasi bahasa dengan berbagai cara yang bersesuaian akan memudahkan pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia. Apalagi pelaksanaannya bersifat berjenjang dan tertata mulai dari tingkat operasional sampai tingkat administratif-pusat. Ini akan menjadikan identifikasi dan penetapan



jumlah dan bentuk penelitian kebahasaan dan kesusastraan lebih pasti dan beralasan.

Lalu, pertanyaan kedua berkenaan dengan bagaimana prinsip dan prosedur kerja penelitian dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa dapat dilaksanakan untuk mendapatkan pemetaan dan laporan jumlah dan bentuk kajian bahasa dan sastra secara lebih tepat dan berterima. Sesuai dengan yang sudah dikemukakan di atas, gagasan yang disampaikan pada makalah ini bukan untuk “membatalkan” apa yang sudah diusulkan dan dijalankan oleh ahli dan peneliti terdahulu terkait dengan pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia. Makalah ini bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan model penelitian dan pemetaan bahasa dan sastra terdahulu dengan melaksanakan prinsip dan prosedur kerja dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa serta memanfaatkan teknologi mutakhir yang ada.

Berdasarkan prinsip dan prosedur kerja penelitian dokumentasi bahasa mutakhir, baik disertai oleh revitalisasi bahasa maupun tidak, ada lima langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan pemetaan dan laporan jumlah dan bentuk penelitian bahasa dan sastra daerah di Indonesia secara lebih tepat dan berterima. Pertama, sebelum melaksanakan prinsip dan prosedur kerja penelitian dokumentasi (dan revitalisasi), diperlukan sistem pelaksanaan penelitian pemetaan berjenjang secara nasional, mulai dari tingkat operasional di setiap daerah terkecil hingga ke tingkat pusat. Ini merupakan langkah awal yang memerlukan “kemauan” dan “dukungan” dari semua pihak terkait, seperti ilmuwan, peneliti, pemerintah, masyarakat, dan pengguna hasilnya. Langkah pertama ini lebih bersifat politis-administratif disertai psikologis dari berbagai pihak. Dokumentasi (dan revitalisasi) bahasa hendaknya menjadi program dan proyek penelitian bahasa dan sastra daerah secara nasional yang dilakukan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Kekayaan bahasa, sastra, dan budaya bangsa Indonesia yang tersebar pada kawasan yang amat luas adalah kekayaan alamiah, ilmiah, dan khazanah yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak untuk menggali dan mengelolanya. Hasil kajian dan pemetaan penelitian bahasa dan sastra daerah yang baik dan tertata akan mempunyai nilai jual tersendiri sebagai cerminan kekayaan sosial-budaya dengan kekhasan sendiri. Langkah pertama ini perlu mendapat dukungan bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah dan pemanfaat hasilnya.

Langkah kedua yang harus dilakukan sehubungan dengan bagaimana dokumentasi (dan revitalisasi) bahasa dapat dilaksanakan untuk mendapatkan pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia adalah membuat pelatihan dan/atau lokakarya di berbagai tempat dan lembaga terkait tentang dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa. Pelatihan dan/atau lokakarya ini bertujuan untuk memberi bekal teoretis dan pemahaman apa itu dokumentasi (dan revitalisasi) bahasa, bagaimana pelaksanaan di lapangan, dan seperti apa pelaporannya secara keilmuan dan administratif. Pelatihan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya mendapat sumber daya manusia yang andal dan banyak sehingga dapat mendokumentasikan fenomena bahasa dan sastra dengan baik. Sejauh ini, beberapa pelatihan dokumentasi bahasa sudah pernah ada di beberapa kota dan lembaga di Indonesia, seperti di Jakarta, Denpasar, Kupang, Makassar, Jayapura, Jambi, dan beberapa kota lain. Akan tetapi, pelatihan dan/atau lokakarya yang dilaksanakan belum mencukupi untuk melaksanakan penelitian dokumentasi bahasa dan sastra di Indonesia yang sangat luas kawasannya.



Selain untuk memberi dan memperkuat dasar keilmuan tentang dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa beserta bagaimana melaksanakannya di lapangan, pelatihan akan sangat berguna untuk memperkenalkan dan melatih penggunaan alat-alat rekam audio-visual secara tepat-guna, membuat transkripsi dan anotasi, melakukan analisis dan penerjemahan, pengarsipan (penyimpanan) data, dan memublikasikannya. Kegiatan pelatihan ini mempunyai arti penting untuk memantapkan pemahaman dan pelaksanaan prinsip kerangka kerja penelitian dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa mutakhir dapat terlaksana. Seperti sudah dipaparkan pada bagian terdahulu, ada tujuh langkah (prosedur) pelaksanaan penelitian dokumentasi bahasa mutakhir yang dikembangkan oleh para ahli, yaitu perekaman, transkripsi, anotasi, analisis, terjemahan (untuk bahasa komunikasi lebih luas), pengarsipan, dan penyebaran hasil kajian. Pemahaman teoretis atas tujuh langkah ini dan bagaimana melaksanakannya secara operasional adalah materi utama pelatihan pada langkah kedua ini.

Langkah ketiga adalah turun ke lapangan untuk melaksanakan penelitian berdasarkan prinsip dan prosedur kerja dokumentasi bahasa. Pelaksanaan penelitian dokumentasi (dan revitalisasi) bahasa adalah puncak kinerja penelitian yang membutuhkan waktu, biaya, dan kemauan keras pelaksananya. Bisa jadi seorang peneliti dokumentasi bahasa harus menempuh perjalanan panjang dan sulit dan tinggal berbulan-bulan di tengah-tengah masyarakat penutur bahasa dan pemilik sastra yang sedang diteliti. Luasnya wilayah Indonesia dan sulitnya medan di lapangan adalah tantangan utama yang harus dihadapi oleh para peneliti. Pada dasarnya, tiga prosedur kerja pertama (perekaman, transkripsi, dan anotasi) dari penelitian dokumentasi bahasa harus selesai di lapangan secara utuh. Sementara itu, prosedur kerja lanjutannya (analisis, penerjemahan, pengarsipan, dan distribusi) boleh jadi dilakukan setelah merasa cukup mendapat rekaman data dan informasi kebahasaan dan kesusastraan di lapangan. Langkah ketiga ini menjadi pokok utama dari rangkaian penelitian dokumentasi dan revitalisasi bahasa secara keseluruhan.

Langkah keempat adalah membuat dan melaporkan hasil-hasil penelitian secara ilmiah dan administratif. Laporan ilmiah berkenaan dengan hasil analisis data (sesuai dengan batasan dan tujuan penelitian), penerjemahan data beserta hasil-hasilnya, laporan pengarsipan, dan pendistribusiannya. Laporan ilmiah ini sangat penting untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerja pada tataran keilmuan dan dunia linguistik. Membuat laporan secara administratif adalah pelaporan secara kelembagaan dan kenegaraan tentang hasil penelitian dan laporan ilmiahnya, mulai dari tingkat operasional terendah sampai tingkat pusat (nasional). Pelaporan ilmiah dan administratif ini sangat berarti untuk mencatat jumlah, arah, bentuk, dan sejauh mana penelitian sudah dilakukan. Laporan ini sangat bermanfaat untuk pemetaan dan pengidentifikasi bahasa dan sastra daerah sehingga jumlah, arah, bentuk, dan tindak lanjut penelitian dapat disebut secara lebih pasti. Pada langkah inilah sebenarnya catatan dan pemetaan penelitian bahasa dan sastra daerah dapat dilakukan dan dipublikasikan. Mungkin, inilah yang masih belum tertata secara baik sehingga sulit untuk memastikan jumlah dan arah kajian kebahasaan dan kesusastraan sejauh ini.

Langkah terakhir bagaimana penelitian dokumentasi (dan revitalisasi) bahasa dapat dilaksanakan untuk mendapatkan pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah adalah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengarsipkan, memublikasikan rekaman data dan hasil analisis, dan memperbarui (*updating*)





perkembangan pendokumentasian dan perevitalisasian bahasa dan sastra yang dicapai. Langkah ini sangat penting untuk memperbarui informasi tentang sejauh mana penelitian dokumentasi dan revitalisasi bahasa sudah dilaksanakan dan apa hasil-hasilnya terkait dengan pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah. Langkah ini menjadi “sumber” informasi untuk menyatakan jumlah, arah, bentuk, dan tindak lanjut penelitian bahasa dan sastra daerah di Indonesia. Dengan langkah ini akan ada informasi pembaruan data dan informasi tentang penelitian bahasa dan sastra daerah sepanjang waktu.

## **PENUTUP**

Tidak menjadi pertanyaan lagi bahwa bahasa, karya sastra, dan fitur-fitur budaya daerah yang ada di Indonesia adalah kekayaan nasional yang tidak ternilai harganya. Kehilangan satu bahasa dan karya sastra, misalnya, adalah kerugian yang sangat besar secara sosial-budaya meskipun sebagian orang tidak merasakan itu. Banyak fenomena manusia, kehidupan muka bumi, dan sejarah peradaban manusia terekam dalam bahasa dan karya sastra. Indonesia sangat beruntung dianugerahi oleh Tuhan mempunyai bahasa dan sastra dengan jumlah yang sangat banyak. Perbedaan bahasa dan budaya daerah adalah hal yang sangat “indah” untuk membuat Indonesia muncul sebagai negara besar yang aneka bahasa dan aneka budaya. Oleh karena itu, bahasa dan karya sastra perlu dirawat dan dikembangkan dengan baik sebagai dasar pembentukan dan pengembangan bahasa dan sastra nasional.

Di sisi lain, jumlah bahasa dan sastra yang banyak dan luasnya wilayah Indonesia sering pula melahirkan “masalah”, baik secara sosial-budaya maupun ilmiah. Secara ilmiah, sampai saat ini pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah yang berkenaan dengan jumlah dan pengidentifikasiannya masih belum satu. Artinya, pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia memerlukan pemikiran bersama dan perbaikan secara metodologis dan teoretis. Selain itu, pendekatan dan model penelitian baru yang sesuai dengan sifat-perilaku kebahasaan dan kesusastraan di Indonesia perlu ditawarkan agar masalah pemetaan dan pengidentifikasian yang berbeda dapat diatasi.

Makalah ini, yang diracik-kembangkan secara teoretis-argumentatif, menawarkan pendekatan atau model penelitian kebahasaan, yang juga dapat dimanfaatkan oleh penelitian sastra, yaitu penelitian revitalisasi bahasa (*language revitalization*). Gagasan yang disampaikan melalui makalah ini tidak untuk mengganti pendekatan atau model penelitian pemetaan bahasa yang sudah ada sebelumnya, tetapi untuk memperkuat dan mengembangkannya untuk mendapatkan pemetaan dan pengidentifikasian bahasa dan sastra daerah di Indonesia secara lebih tepat dan merata.

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan menyeluruh, penelitian dokumentasi dan revitalisasi bahasa ini perlu dilakukan secara terencana, melembaga, dan menjadi program penelitian bahasa dan sastra daerah secara nasional. Artinya, penelitian dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa hendaknya dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, mulai dari tingkat operasional di daerah khusus sampai tingkat nasional. Semuanya harus dilaksanakan secara ilmiah dengan memenuhi pelaporan secara ilmiah dan administratif pula agar dapat dicatat secara melembaga dan nasional. Pendokumentasian dan perevitalisasian bahasa dan sastra daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi audio-visual mutakhir adalah



adalah salah satu cara terbaik untuk melakukan pemetaan dan pengidentifikasian bahasa dan karya sastra daerah secara tepat dan menyeluruh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Appel, R., dan Muysken, P. (1987). *Language Contact and Bilingualism*. London: Edward Arnold.
- Bonvillain, N. (1997). *Language, Culture, and Communication: The Meaning of Messages*. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Collin, J. T. (2018). 'Language Revitalization and the Empowerment of Local Communities: Looking for the Right Strategy' dalam *Proceedings International Conference on Local Languages*. Kupang: APBL Kupang, Nusa Cendana University, dan Satya Wacana University Press.
- Gippert, J., Himmelmann, N. P., dan Mosel, U. (editor). (2006). *Essentials of Language Documentation*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Gumono. (2010). 'Peta Penelitian Kebahasaan di Indonesia: Satu Sketsa Teoretis'. <http://gumonounib.wordpress.com/2010/06/04/peta-penelitian-kebahasaan>.
- Jufrizal. (2012). *Tatabahasa Bahasa Minangkabau*. Padang: UNP Press.
- Klammer, M. (2018). 'Documenting the Linguistic Diversity of Indonesia: Time is Running Out' dalam *Proceedings International Conference on Local Languages*. Kupang: APBL Kupang, Nusa Cendana University, dan Satya Wacana University Press.
- Mahayana, M. S. (tanpa tahun). 'Peta Sastra Indonesia Mutakhir' (makalah). Jakarta: Prodi Indonesia Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.
- Mahsun. (2008). 'Pemetaan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia' (makalah disampaikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia). Jakarta: Panitia Kongres Internasional Bahasa Indonesia IX.
- Schendle, H. (2001). *Historical Linguistics*. Oxford: Oxford University Press.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 3 Kelompok 9**

Pembicara : Jufrizal  
Judul Makalah: “Pemetaan dan Kajian Bahasa dan Sastra Daerah:  
Pendokumentasian dan Pervitalisasian”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 10.15—11.45  
Moderator : Dr. Tengku Syarfina, M.Hum.  
Pencatat : 1. Triwulandari  
2. Winci Firdaus

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Pemetaan kajian kebahasaan dan sastra daerah Nusantara sejauh ini dipantau berdasarkan “laporan-laporan” yang diperoleh oleh lembaga bahasa (pusat) yang berasal dari para peneliti dan pengkaji bahasa dari perguruan tinggi, peneliti mandiri, lembaga-lembaga bahasa di daerah, dan para peneliti asing yang menerbitkan temuan pada jurnal dan terbitan internasional.
2. Adanya perbedaan jumlah bahasa daerah ini adalah bagian dari masih bermasalahnya pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia.
3. Pokok bahasan tulisan mengenai pemetaan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia yang sudah ada, sejauh ini, lebih banyak dikaitkan dengan penelitian dialektologi, linguistik historis-bandingan, dan pendaftaran serta penerbitan karya sastra yang ada di Indonesia. Selain dengan cara yang sudah dilaksanakan dan berjalan tersebut, pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah dapat dilaksanakan melalui kajian pendokumentasian dan pervitalisasian (*documentation and revitalization*).
4. Berdasarkan alasan-alasan mendasar akan pentingnya penelitian dokumentasi bahasa, seperti yang dikemukakan oleh Himmelmann (2006) di atas, ada satu manfaat lain yang dapat diturunkan dari rangkaian alasan-alasan tersebut, yaitu bahwa penelitian dokumentasi bahasa (pendokumentasian bahasa) sangat membantu untuk melakukan pemetaan kajian bahasa, termasuk kajian sastra.
5. Pertanyaan pokok pertama yang harus dijawab melalui makalah ini adalah mengapa dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa diperlukan dalam upaya pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia?
6. Jawaban untuk pertanyaan ini memerlukan tinjauan teoretis dan informasi peta penelitian tentang bahasa dan sastra daerah secara umum. Sejauh ini, pemetaan kajian bahasa bahasa dan sastra daerah, sekurang-kurangnya, mempunyai tiga masalah: (i) belum ada pemetaan pasti tentang jumlah, bentuk, dan arah kajian yang sudah dan yang akan dilakukan; (ii) belum meratanya jumlah dan mutu penelitian bahasa dan sastra daerah untuk menjangkau kawasan pemakaiannya yang sangat luas; (iii) adanya perbedaan metodologi dan landasan teoretis-filosofis pengkajian bahasa dan sastra. Ketiga masalah ini sudah menjadi pemikiran dan bahan diskusi di kalangan ilmuwan dan peneliti bahasa dan sastra.



7. Makalah ini menawarkan pendekatan dan metode penelitian dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa (dan sastra) untuk digunakan dan diprogramkan secara nasional, baik untuk penelitian bidang bahasa maupun sastra daerah.
8. Tidak menjadi pertanyaan lagi bahwa bahasa, karya sastra, dan fitur-fitur budaya daerah yang ada di Indonesia adalah kekayaan nasional yang tidak ternilai harganya. Kehilangan satu bahasa dan karya sastra, misalnya, adalah kerugian yang sangat besar secara sosial-budaya meskipun sebagian orang tidak merasakan itu. Banyak fenomena manusia, kehidupan muka bumi, dan sejarah peradaban manusia terekam dalam bahasa dan karya sastra. Indonesia sangat beruntung dianugerahi oleh Tuhan mempunyai bahasa dan sastra dengan jumlah yang sangat banyak. Perbedaan bahasa dan budaya daerah adalah hal yang sangat “indah” untuk membuat Indonesia muncul sebagai negara besar yang aneka bahasa dan aneka budaya. Oleh karena itu, bahasa dan karya sastra perlu dirawat dan dikembangkan dengan baik sebagai dasar pembentukan dan pengembangan bahasa dan sastra nasional.
9. Di sisi lain, jumlah bahasa dan sastra yang banyak dan luasnya wilayah Indonesia sering pula melahirkan “masalah”, baik secara sosial-budaya maupun ilmiah. Secara ilmiah, sampai saat ini pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah yang berkenaan dengan jumlah dan pengidentifikasiannya masih belum satu. Artinya, pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah di Indonesia memerlukan pemikiran bersama dan perbaikan secara metodologis dan teoretis. Selain itu, pendekatan dan model penelitian baru yang sesuai dengan sifat-perilaku kebahasaan dan kesusastraan di Indonesia perlu ditawarkan agar masalah pemetaan dan pengidentifikasian yang berbeda dapat diatasi.
10. Makalah ini, yang diracik-kembangkan secara teoretis-argumentatif, menawarkan pendekatan atau model penelitian kebahasaan, yang juga dapat dimanfaatkan oleh penelitian sastra, yaitu penelitian revitalisasi bahasa (*language revitalization*). Gagasan yang disampaikan melalui makalah ini tidak untuk mengganti pendekatan atau model penelitian pemetaan bahasa yang sudah ada sebelumnya, tetapi untuk memperkuat dan mengembangkannya untuk mendapatkan pemetaan dan pengidentifikasian bahasa dan sastra daerah di Indonesia secara lebih tepat dan merata.
11. Untuk mendapatkan hasil yang baik dan menyeluruh, penelitian dokumentasi dan revitalisasi bahasa ini perlu dilakukan secara terencana, melembaga, dan menjadi program penelitian bahasa dan sastra daerah secara nasional. Artinya, penelitian dokumentasi bahasa dan revitalisasi bahasa hendaknya dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, mulai dari tingkat operasional di daerah khusus sampai tingkat nasional. Semuanya harus dilaksanakan secara ilmiah dengan memenuhi pelaporan secara ilmiah dan administratif pula agar dapat dicatat secara melembaga dan nasional. Pendokumentasian dan perevitalisasian bahasa dan sastra daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi audio-visual mutakhir adalah salah satu cara terbaik untuk melakukan pemetaan dan pengidentifikasian bahasa dan karya sastra daerah secara tepat dan menyeluruh.



## **Tanya Jawab**

### **Penanya 1**

Nama : Obing Katubi  
Instansi : LIPI

#### **Pertanyaan:**

Yang didiskusikan apa? Pemetaan bahasa atau pemetaan kajian bahasa? Bagaimana pendokumentasian bahasa dimanfaatkan atau diterapkan untuk pemetaan?

#### **Jawaban:**

Bagaimana kita merekam bahasa itu apa adanya dari sisi fonologis sampai semantis. Pemetaan bahasa dan pemetaan kajian bahasa bisa diawali dengan penelitian dokumentasi bahasa. Yang paling penting dalam pendokumentasian bahasa adalah bagaimana bahasa itu terakam sebanyak mungkin.

### **Penanya 2**

Nama : Ari Andarwati  
Instansi : Universitas Islam Malang

#### **Pertanyaan:**

Pemetaan sudah dilakukan dan dilanjutkan dengan revitalisasi, lalu diberikan kepada pemerintah daerah, apakah sudah ada contoh kalau pemda bisa bergerak, dan sosialisasi tentang bahasa setempat yang dapat disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia.

#### **Jawaban:**

Kearifan lokal dapat didokumentasikan sehingga dapat menjadi pengetahuan dan pelajaran bagi masyarakat, contoh: kejadian di Palu, dilihat dari penamaan dan musibah bahwa di Kota Palu pernah terjadi likuefaksi semenjak dahulu. Andai kearifan lokal itu bisa tersebar, kemungkinan korban tidak akan terlalu banyak. Untuk hal-hal yang sifatnya politis dapat diusulkan bersama ke pemerintah setempat.

### **Penanya 3**

Nama : Ita Ristanti  
Instansi : IAIN Cirebon

#### **Pertanyaan:**

Permasalahan terjadi pada identitas bahasa, Untuk penelitian lanjutan apakah boleh dilakukan? Jumlah pembahasan idealnya bisa satu atau lebih dari satu dialek, mohon penjelasan?

#### **Jawaban:**

Pemahaman yang berbeda antara bahasa, dialek, dan subdialek di antara para penutur bahasa. Untuk menentukan perbandingan diperlukan data yang banyak



sehingga bisa menentukan apakah bahasa itu dialek, subdialek atau bahasa. Pemetaan bisa menjangkau lebih dari satu dialek.

**Penanya 4**

Nama : Yohanis

Instansi : Universitas Flores, NTT

**Pertanyaan:**

Dokumentasi sastra yang berkembang di Provinsi NTT banyak yang terbit secara *online*, padahal kesiapan saya masih dokumentasi tercetak? Bagaimana pandangan Bapak?

**Jawaban:**

Kita bisa minta bantuan para pakar atau ahli agar karya sastra tersebut bisa didaringkan. Kelebihan daring adalah banyak orang akan membaca.

**Penanya 5**

Nama : Buha Aritonag

Instansi : Badan Bahasa

**Pertanyaan:**

Dari mana kita harus memulai? Mengapa Bapak tidak merujuk jumlah bahasa dari Badan Bahasa? Terkait sastra, Badan Bahasa akan melakukan pemetaan sastra di Indonesia. Bagaimana menurut Bapak?

**Jawaban:**

Penentuan jumlah bahasa dari banyak versi disebabkan oleh faktor teoretis dan praktis, mohon maaf data Badan Bahasa tidak dimasukan karena tujuan peneliti hanya menunjukkan bahwa perbedaan jumlah itu berbeda. Pemetaan karya sastra masih banyak belum disentuh oleh peneliti. Di samping kita melakukan pendokumentasi bahasa, sebaiknya pendokumentasian sastra juga dilakukan dan sastra merupakan jati diri sebuah bangsa. Pendokumentasian merupakan salah satu bentuk yang bisa dilakukan untuk pemetaan bahasa dan sastra.

**Isu-Isu Penting:**

1. Dokumentasi bahasa yang baik memerlukan partisipasi dan kolaborasi dari penutur asli secara individu dan komunitas tutur secara keseluruhan.
2. Penggunaan telepon pintar dalam pendokumentasian bahasa.
3. Bentuk dan hasil kajian pemetaan bahasa daerah dan sastra yang banyak dan beragam melahirkan “kesimpangsiuran” jumlah dan pengidentifikasiannya.
4. “Perdebatan” tentang jumlah dan identifikasi bahasa yang sulit dijumpai. Yang disebabkan oleh perbedaan penelaahan, teori, dan kerangka pikir yang digunakan oleh peneliti.
5. Harus ada upaya untuk menghidupkan atau menguatkan kembali bahasa-bahasa yang hampir punah.
6. Pendokumentasian bahasa harus disimpan dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi mutakhir.



7. Perhatian pendokumentasian sastra tertinggal jauh jika dibandingkan dengan pendokumentasian bahasa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya dan perhatian dari Badan Bahasa untuk melakukan pemetaan sastra.



#### 4. Penelitian Keekerabatan Bahasa dan Sastra Daerah di Indonesia

Judul : Penelitian Keekerabatan Bahasa dan Sastra Daerah di Indonesia  
Pembicara : Prof. Dr. Melani Budianta  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 13.45—15.15  
Moderator : Dr. Sastri Sunarti  
Pencatat : 1. Dina Alfiyanti Fasa  
2. Ibnu Kharish

Selamat siang, Bapak/Ibu sekalian. Sesudah makan, biasanya jam-jam *ngantuk, ya?* Kita akan bicara (tadi sudah banyak bicara tentang bahasa, sekarang kita bicara) tentang sastra dan sepertinya tugas saya untuk berbicara tentang keekerabatan sastra daerah. Akan tetapi, hari ini saya mau memakai istilah lain, yaitu keekerabatan sastra Nusantara. Mengapa begitu, *ya?* Ya, ada politiknya, *gitu, ya?* Silakan, Pak. Politikanya, silakan. Ini secara umum dulu. Saya akan mengatakan bahwa kita bicara bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda *kan* barusan, *ya*, kemarin, *ya*. Akan tetapi, kalau memajukan sastra dan bahasa Indonesia, tidak bisa juga dilepaskan dari memajukan sastra dan bahasa Nusantara. Nanti saya beri tahu mengapa saya mengatakan itu.

Memang bahasa nasional yang kita junjung ini bertumbuh juga dari sumbangan-sumbangan kosakata dan dinamika dari bahasa-bahasa di Nusantara. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa penting bagi kita untuk menjaga kemajuan sastra dan bahasa Nusantara. *Nah*, yang saya sebut keekerabatan di sini adalah sinergi dan penguatan, *ya*, satu sama lain sehingga dunia bukan hanya Indonesia, tetapi bisa diperkaya oleh kekayaan yang kita punya dari bahasa dan sastra. *Oke*, lanjut. *Kenapa kok* sastra Nusantara? Karena kita punya konstruksi yang sudah telanjur masuk, begitu, *ya*, tentang dikotomi, *gitu, ya*.

Kalau kita bisa bilang bahasa daerah, itu rasanya seperti, apa *ya*, ada hierarki, *ya*. Bahasa nasional, bahasa Indonesia di atas bahasa daerah. Jadi, ada pusat, ada pinggiran, *gitu, ya*. Yang satu utama, yang satunya penunjang, *gitu, ya*. Ada yang kanon, ada yang bukan kanon, *gitu, ya*. Kanon itu artinya yang diutamakan, yang dimajukan. *Terus* yang satunya nasional skopnya, yang satu terbatas pada nilai tertentu saja. Ada hierarki dan biasanya kapital budayanya tidak seimbang. Artinya begini, kalau seorang sastrawan itu dikenal sebagai seorang sastrawan Jawa, Sunda, yang menulis dengan bahasa tempat dia berada, itu dikenalnya sedikit, hanya sebatas itu. Akan tetapi, kalau dia bisa masuk ke Cerpen Minggu di Kompas, dulu, zaman *dulu* itu masuk ke Horizon, dan sebagainya, lalu dia mendapat hadiah, apa itu, Khatulistiwa Award, ... maka dia seakan-akan lebih tinggi statusnya, *gitu, ya*. *Nah*, ada yang seperti itu.

Kapital budaya yang tidak seimbang. Akibatnya, tadi seperti kata Mas Iqbal ada pergeseran tadi yang tadinya bagaimana makin lama makin *jadi* ada relasi kuasa di situ yang tidak imbang, *ya*. Demikian juga pengembangan pengetahuannya. Pengetahuan ilmunya itu lebih gencar untuk yang sastra nasional atau sastra Indonesia, berbahasa Indonesia daripada yang berbahasa daerah. Oleh karena itu, saya memakai Nusantara. Ini sebagai suatu cara saya untuk bicara hari ini supaya bahasa Indonesia hanya salah satu dari bahasa-bahasa yang lain. Kalau kita bicara bahasa Nusantara kita tidak terlalu negara sentris, *gitu, ya*, sebab wilayah-wilayah





yang dekat, bahasa-bahasa di Nusantara itu cukup dinamis, berkelana, *gitu, ya*. Seperti kita naik, biasanya di sini sudah *makai* traveloka atau apa, zaman itu tidak ada. Bahasanya sudah berkelana sampai ke luar batas-batas wilayah. Sebelum Indonesia ada, bahasa-bahasa di Nusantara ini sudah berkeliling sehingga kalau Anda ke Filipina ada itu kata melati, kanan, surat, sakit, ada di Filipina, masuk bahasa Tagalog.

Demikian juga bahasa-bahasa, kita tahu di Thailand, di mana-mana kita mendengar. Bahkan, kalau Anda mau meneliti Cerita Panji, ada yang tahu Cerita Panji, ya? Cerita Panji itu, Anda ke Thailand ada juga ada raden. Namanya bukan Raden Inu, ya? Apa? Ino, ya? Apa agak mirip, *gitu, ya*, tetapi itu Cerita Panji. Ada di Thailand Selatan, begitu. Karena apa? Dulu mereka bagian dari Majapahit, *kan*, sebelum Indonesia ada. Jadi, Nusantara itu lebih, bisa lebih, sebelum Indonesia ada sudah ada. Jadi, untuk kepentingan itu saya bicara supaya dikotominya tidak, *gitu, ya*. Baik. Lanjut, Mas. *Nah*, pengetahuannya sudah ada yang, kita bisa cari, ya, di Google itu banyak beberapa ini Mas Iqbal tentang Madura belum masuk di situ. Lalu, ada I Nyoman Dharma Putra *kan* sudah presentasi, ya, tadi, ya. Ada Wildan, orang asing malah belajar bahasa Lombok, Batak. Kemudian, tesis-tesis, skripsi, ini buku-buku dari balai bahasa yang tadi itu, ya. Sebetulnya, sudah ada, tetapi rasanya *kok* kurang, terlalu apa, ya? Tren, *gitu, ya*. Tidak terlalu dianggap penting, kurang kita majukan dan ini memajukan budaya Indonesia, memajukan ini juga. Silakan.

*Nah*, produksi pendukungnya. Artinya, ada antologi-antologi dibuat. Kalau kita lihat di apa, di tas kita yang ada dari Badan Bahasa itu ada juga, ya? Banyak, ya, yang sudah. Nurhayati Rahman ini yang juga menyebabkan seorang dari Singapura mengambil sastra dari mana? Dari wilayah mana? Wilayah Daligo? Bugis? Kemudian, dibawa ke Singapura, dipentaskan di sana akan menjadi sangat fenomenal, ya? Ini karena kita mulai mendata, ya, dan orang-orang itu. Biasanya begitu yang terjadi di Indonesia. Kita sendiri kurang merasa percaya diri dengan apa yang kita punyai. Nanti kalau ada orang lain datang, meliat, wah, ini *kok* luar biasa! Lalu, dibawa ke sana. *Nah*, baru kita merasa, oh, iya, itu bagus, ya. *Nah*, itu semacam penyakit yang harus kita atasi, ya. *Nah*, ini sebetulnya sudah mulai ada. *Nah*, sebetulnya kita harus berterima kasih pada seorang dan saya merasa malu sekali pada tokoh ini, yaitu Pak Ayip Rosidi. Salah saya, salah nulis mungkin, ya, harusnya pake ‘y’, ya? ‘S’-nya satu. Maaf, ya. Ayip Rosidi. Salah ketik. Kita merasa mengeluh pada Ayip. Pak Ayip ini karena beliau mulai dari sastra Sunda dulu. Bahasa dan sastra Sunda, tetapi kemudian mulai, mulai terus dengan penghargaan Namanya .... Sudah tiga puluh tahun Pak Ayip ini memberi penghargaan, ya, apa? Yasayo ada, ya? Yogya, ya? Sudah berapa tahun Yasayo? Lima tahun, ya. *Nah*, Pak Ayip tiga puluh tahun. Dari kantongnya sendiri dia cari sendiri. Tidak *pakai* bantuan pemerintah. Kita *kan* mestinya malu.

Sebagai instansi pemerintah, Badan Bahasa juga mestinya malu *sama* Pak Ayip. Pemerintah juga mestinya malu pada Pak Ayip. Kita sendiri juga sebagai warga masyarakat *kok* ada orang seperti Pak Ayip, mau memajukan sastra bahasa daerah dari kantongnya sendiri tanpa bantuan yang lain. Ya, mungkin cari-cari, ya, temannya yang bisa bantu, ya, tetapi ini luar biasa sebetulnya. Gerakannya mana, *gitu, ya*. Kalau Pak Ayip sudah mulai, mestinya kita bantu, *gitu*. *Nah*, mengapa *kok* agak lambat. *Nah*, kita akan bicarakan selanjutnya. *Nah*, ini *kan* sebetulnya kalau kita lihat, kita bisa mengumpulkan, sebelum mengawali penelitian, *kan* kita cari



bahannya dulu, *nih*. *Nah*, bahannya ada di mana? Bahannya seperti kata Mas Iqbal tadi, lisan, ya, tadinya lisan kita bisa cari, sekarang lisan masih hidup.

Walaupun tadi dibuat periodenya, yang lisan masih berjalan terus, ya. Jadi, bisa dari wawancara, bisa direkam, tetapi ini juga bahan. Bisa kita kumpulkan. Ini baru cuma Sunda, Mangle, lalu Jawa, Jawanya macam-macam, ada Banyumasan, Batak, ya, kemudian Minang, itu Minangnya, saya tidak menemukan majalah, tetapi mungkin teman-teman tahu, *gitu*, ya. Kemudian, bahasa Maluku atau mungkin justru ini di balai bahasa, kalian bisa mendatanya. Majalah-majalah apa, berbahasa apa. Kumpulkan semua. *Iya*, kan? Ini *kan* kekayaan penelitian yang seumur hidup *ga* habis-habis. Kalau Anda seorang peneliti di mana pun, ya, banyak sekali sebetulnya, ya. Lalu, nanti ke tempat-tempat yang lain, ya, selain yang sudah begini seperti yang kata Pak Iqbal tadi sangat bagus. Tadi sudah diberikan oleh Pak Iqbal. Lanjut. *Nah*, ini .... Di Bali itu, mulai tahun 2003 sepertinya ada kebangkitan, ya. Kelihatannya ada gairah begitu. *Nah*, itu kita mesti lihat apa yang menyebabkan naik turunnya ini, gairah penulis ini. Sembilan belas buku dalam bahasa sastra Bali. Kalau Jawa saya kira juga masih banyak produksinya karena saya masih sering mendapat kiriman, *gitu*, ya. Sunda mungkin masih juga, ya. *Nah*, ini mulai dengan apakah karena desentralisasi. *Nah*, kita lihat, ya. Otonomi, setelah orde baru itu ada namanya desentralisasi, ada otonomi daerah, mulai ada macam-macam. Apakah konteks kebijakan-kebijakan ini memengaruhi gairah seperti itu. Jadi ini suatu tanda-tanda yang cukup baik bahwa masih hidup, dia tidak hilang seperti dikhawatirkan oleh Mas Iqbal. Masih ada, ya. Selanjutnya.

*Nah*, kalau kita bilang kekerabatan itu *kan* asalnya dari linguistik, ya. Kekerabatan bahasa itu biasanya terkait dengan rumpun, dengan keluarga, *gitu*, ya dan biasanya *kan* dicari asal usulnya dari rumpun mana, Austronesia *gitu kan* atau bahasa apa. Lalu dilihat kesamaannya dan sebagainya. Bagaimana dengan sastra, ya. Apakah karya sastra hanya dilihat sebagai sarana saja untuk meliat persoalan bahasa. *Nah*, ini sering kali di Badan Bahasa begitu, ya. Ini perlu. Sastra itu makin di pinggir aja. *Kenapa?* Lihat itu, lihat ini contoh-contohnya aja *gitu kan* dari bahasa.

Padahal, sastra itu mempunyai dinamika dan jiwa sendiri. Dia hidupnya di situ. Kalau bahasa cuma di awang-awang *aja*, cuma di buku kamus ya *ga* jadi apa-apa, tetapi karena bahasa itu dipakai, diekspresikan, dan ekspresi paling tinggi dari bahasa itu adalah sastra. Dia adalah permainan kosakata dan di situlah kehidupan. Jadi, dia tidak hanya sekadar dilihat begitu. *Nah*, apakah ada metode khusus untuk melihat kekerabatan sastra yang bukan sekadar dari kosakatanya dan sebagainya. *Nah*, tadi metodenya sudah ditunjukkan salah satunya dari yang dilakukan Pak Iqbal, ya. Dengan melihat tadi macam-macam itu, ya, metodenya yang dibagikan itu salah satu jalan, tetapi bukan hanya satu-satunya jalan, ya. Kita lihat, misalnya, contoh ini, penelitiannya, lanjut, Pak. Ini namanya Ding Jommy. Dia orang apa Ding Jommy? *Udah* pernah diundang? Singapura kalau *ga* salah. Dari Singapura, ya. Ding Jommy ini sangat cinta pada pantun. Ke mana-mana menelitinya pantun terus, *gitu*, ya. Setia pada pantun pasti dia itu dan dia menemukan bahwa ada kekerabatannya. Bukan hanya itu, Nusantara tadi tidak terbatas di pantun melayu saja. Dia lihat di Brunei, Malaysia memang Melayu, Singapura, Filipina, *gitu*, ya. Bahkan, dia melihat Sunda, Jawa, ada pola pantunnya, *gitu*, ya. Dia meneliti itu sampai Patani sampai ke mana-mana *gitu*. Mindanao, *gitu*, ya.



Lalu dia melihat bahwa sama sampiran dan isi itu polanya ada. Dia mengumpulkan pantun-pantun. *Nah*, ini orang yang betul-betul melakukan itu tadi kekerabatan Nusantara tadi karena tidak hanya terbatas pada daerah satu dibawa ke daerah seakan-akan dibawa ke Indonesia, tetapi itu bisa keluar dari situ melihat kekerabatannya di luar. Ini salah satu contoh dilakukan Ding Jommy yang sangat setia sekali menanganinya itu, ya. Ini kalau mau lihat, dapat dilihat di wacana jurnalnya, ya. Lanjut. *Nah*, apa?

Tadi sudah ditentukan ditunjukkan oleh Saudara Iqbal. Cerita rakyat, coba ada motif-motif tertentu dilakukan, ya, tadi di Badan Bahasa sudah sering itu motif-motif tertentu, motif yang sama. Kalau di cerita rakyat itu anak durhaka banyak banget itu, ya. Itu anak durhaka kenapa *gitu, ya*. *Nah*, kita bisa mempertanyakan cara berpikir apa *sih kok* selalu anak *kok* durhaka, ya. *Terus* ada motif, misalnya, tentang asal mula padi itu hampir merata di mana tadi itu saya kira Asia Tenggara *gitu, ya*. Apa? Pelanggaran terhadap alam, ya, semacam itu. *Nah*, ini kita bias melihat motif-motif tema-temanya itu, ya. Sampai kepada itu tadi pandangan dunia tentang ekologi, ya, kemudian persoalan perempuan *gitu, ya*. Bagaimana kalau asal mula padi selalu yang menjadi asal mula padi itu tubuh perempuan, ya, ya, yang kemudian apakah mati atau dibunuh mengorbankan diri lalu jadi padi. Apa ini pesannya, ya. Lalu ada yang Ibu Tuti, siapa ibu di UI pernah meneliti tentang kepemimpinan, ya, tema kepemimpinan bahwa kita pikir demokrasi segala macam itu dari barat. Tidak juga, *gitu, ya*.

Cerita-cerita rakyat kita di mana macam-macam sastra daerah itu persoalan sastra Nusantara itu persoalan siapa yang mengambil keputusan bagaimana membahas musyawarah lalu siapa yang memimpin itu ada. *Nah*, untuk yang seperti ini akan menarik jika kita bisa melakukan penelitian lintas disiplin dan juga lintas daerah *gitu, ya*. Jadi, ini atau jadi lintas, jadi linguistik, sastra, sosiologi, antropologi, lingkungan, ya. Kita bisa dengan berbagai teman-teman kita dari disiplin lain melihat tidak hanya untuk sastra tulis saja, untuk yang lisan juga. *Iya*, kan. Lalu lihat ini apa, ya. Tadi kepekaan terhadap lingkungan, pelanggaran terhadap lingkungan apa filsafat lingkungannya, *gitu, ya*. Lalu siapa memakainya, bagaimana fungsinya. Banyak sekali. Kadang-kadang aspek ekonominya juga ada, *gitu, ya*. Aspek penjagaan lingkungan itu banyak. Jadi, itu dipakai untuk menjaga suatu lokasi tertentu agar tidak dieksploitasi, misalnya, ya. *Nah*, lalu juga interaksi lintas budaya dan persilangan juga dengan yang berbahasa Indonesia. Kalau kita lihat majalah-majalah yang di atas tadi Mangle, terus apa lagi Joyoboyo, dan sebagainya, yang liat tahun awal tahun sekarang beda sekali. Karena apa? Di tahun-tahun sekarang inter- apa itu inter- apa itu namanya bahasa linguistiknya?

Masuknya bahasa, interferensi dari bahasa Indonesia bahkan bahasa Inggris sudah masuk. Jadi Mangle tahun sekian, Mangle sudah berbeda, iya, kan? Jadi, kita tidak bisa memisahkan sastra Nusantara dari sastra yang berbahasa Indonesia. Kita bisa lihat apa *sih* yang terjadi di sekitarnya, *kenapa kok* berubah begini, *kenapa kok* ceritanya *jadi gini*, jangan-jangan cerita-ceritanya cuma yang ngambil dari TV, pengaruh televisi, pengaruh *nonton* apa, masuk ke dalam cerita-cerita berbahasa Nusantara tadi. Jadi, sebenarnya menarik. Konteks dan perkembangannya tidak terisolasi dari dinamika lokal dan global. Kalau kita memang sastra daerah seakan-akan *aduh* yang ditaruh di museum, *gitu, ya*. Tidak. Sastra Nusantara itu berkembang terus karena dia berada di wilayah lokal dan global ini. Bahkan,



sekarang ada metode baru yang bukan saya ahlinya, tetapi kita bisa minta tolong, yaitu digital humanitis.

Ini ahli-ahli ilmu komputer yang memperhatikan humaniora. Dia bisa *mapping*, misalnya, motif. Kalau dulu kita *ngitungin gitu, ya, diliatin*, ini dia *pakai* program saja asal ada teksnya. Jadi, *kayak* itu tadi sastra dari sastra Batak, sastra ini, ya, asal ada teksnya *gitu, ya*, dalam bentuk teks file itu dimasukkan dalam *software* itu, yang program itu, lalu dia bisa mencari semua, misalnya, kita mau mencari apa bumi atau yang terkait dengan isi alam, misalnya, apa *gitu, ya*, dalam, dia bisa langsung keluar semua dengan persebarannya dengan *wah* macam-macam itu polanya. Jadi, kita bisa *ga* kalah dengan orang-orang yang ilmu kuantitatif itu kalau *pakai* digital humanitis ini alatnya, cuma sarananya saja *gitu, ya*. Namun, kita yang memikirkan apa itu, ya. Jadi, sebetulnya kemungkinan penelitiannya bisa macam-macam *gitu, ya*. Silakan karena ini tadi yang global, nasional, lokal, yang lokal itu bersentuhan dengan nasional bersentuhan dengan global saat ini dan terus bergerak seperti kata Pak Yoman Karim. Dia bukan dipreservasi seperti kita menyimpan di dalam lemari es atau ditaruh di museum. Ini adalah kita anggap sastra Nusantara ini bergerak. Dia terus bergerak. Tentu saja ada dinamika kuasa bahasa, relasi kuasanya ada. Ya, tadi itu yang masih satu dianggap pinggiran. Ada teman saya yang bekerja, dia seorang aktivis yang dari Jakarta pulang ke kampungnya, di desanya. Desanya itu di Ledok Ombo, di Jember, sebuah desa. *Nah*, di desa itu kebanyakan orangnya, orang Madura sebagian, ya, lalu ada orang Jawa. Anak-anak kecil di sana, di sekolah itu malu, dia merasa minder karena Madura ada stereotipe-stereotipe yang kurang menyenangkan diolok-olok dan kalau ditanya dia *ga* mau bekerja-bekerja di daerah, di wilayah situ. Dia maunya jadi dokter di mana, tidak ada identitas lokal yang mereka banggakan. *Nah*, teman saya itu kemudian membuat sebuah komunitas anak-anak untuk bermain anak-anak karena di situ banyak orang tuanya pergi bermigrasi ke Singapura, Malaysia karena tidak bisa hidup di desa karena tidak cukup untuk mencari makan atau menyekolahkan anak-anaknya. Orang tuanya pergi. Anak-anak ini tidak ada yang menjaga, tetapi ditiptkan pada kakek neneknya, *gitu, ya*. Nenek kakeknya tidak, ya, sudah tua, sudah sepuh harus *ngurus* anak-anak, jadi anak-anak itu pun main gawai, ya. Main gawai lalu akhirnya tidak ada kebanggaan terhadap budayanya itu. *Nah*, teman saya itu kemudian membuat komunitas yang disebut Tanoker. Tanoker itu bahasa Madura yang artinya kepompong, *gitu, ya*. Jadi, dia memakai bahasa Madura yang artinya kepompong itu lalu dia mencari lagi mencari lagi permainan-permainan yang sudah hilang direkayasa.

Memang kita harus merekayasa kadang-kadang, ya, Mas, ya, rekayasa kadang-kadang karena sudah hilang, tetapi masih banyak mengingat orang tua generasi ada gap dengan generasinya diingat lagi main egrang, ya. Egrang akhirnya bisa jadi juara satu diundang ke Thailand, ke mana-mana, mereka bangga menjadi Tanoker, menjadi, egrang, dan ini sama seperti itu dengan budayanya. Dia beradat, tetapi dia tidak membatasi diri pada zaman egrang zaman dulu meski begini, pakemnya begini, tidak. Jadi, egrangnya itu nanti tiba-tiba jadi egrang barongsai. *Lho, kok* ada egrang barongsai? Ya, *ga papa*. Kenapa tidak egrang barongsai? *Gitu*. Ada orang asing datang, orang Australia datang, campur *gitu*. Jadi, budayanya bergerak tidak apa-apa. Zaman dulu tidak ada egrang barongsai, sekarang ada egrang barongsai yang main di mal, *gitu, ya*. Jadi, bergerak, tetapi tidak kehilangan kebanggaan dan identitasnya, ya. Jadi, ada konteks dan interaksi lokal global sesuai dengan



perkembangan gaya hidup. Tentu saja nilainya mungkin ada yang berubah, ada yang sama, itu terus bernegosiasi, ya. Kita upayakan, kita negosiasikan, *kan*, budaya itu bukan plek dari sono-sononya terus berhenti. Dia bergerak dan kita bisa merekayasa, memilih, mendinamika dengan orientasi yang berbeda-beda. Lanjut, Mas. *Nah*, masalahnya ini sekarang. Ini yang *jadi* masalah. Kenapa *kok* jadi terpinggirkan.

Siapa *sih* yang memiliki sastra dalam sekarang ini dalam bahasa lain dulu. Ilmunya Mas ini dulu *kan* Inggris, ya. Bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa Nusantara, *gitu, ya*. Inggris itu ada sastra Inggris sekarang juga ada Inggris disebut budaya anglofori atau Prancis, francofori. *Kenapa* begitu? Karena yang memakai bahasa Inggris itu sekarang bukan hanya orang di Kerajaan Inggris atau di Amerika atau Australia. Orang Singapura *pakai* bahasa Inggris, orang India *nulis* sastra Inggris. Lalu, sastra ditulis orang India diterbitkan dalam bahasa Inggris itu namanya apa, *gitu kan? Nah*, ini juga ternyata Inggris itu tidak dimiliki oleh orang Inggris saja. Dimiliki karena dimiliki makin banyak, dia makin maju, *gitu, ya. Nah*, kalau kita kadang-kadang ada rasa, apa, ini punya, *gitu, ya*. Kamu *kan* bukan orang Sunda, *gitu, ya*. Jadi, kalau yang hadiah mesti orang Sunda, *gitu, ya*. Padahal, lihat Pak Miki itu, Miki Hiromoniama dia bahasa Sundanya halus, coba bertanding *deh*, orang Sunda di sini bertanding *sama* Pak Miki itu. Jangan-jangan kalah, *gitu, ya*. Dia bisa berbahasa Sunda halus sekali. Orang Jepang, *gitu, ya*. Apakah karena dia orang Jepang, ya, dia orang luar, lainlah, begitu. Lain. ini punya orang Sunda, dia boleh, tetapi *kayak* begitu *ga* maju-maju. Iya, kan?

*Nah*, gamelan *kenapa* bisa maju? Karena di seluruh dunia sekarang banyak pemain gamelan, orkes gamelan itu malah bisa menyaingi kita semua. Menjadi maju. Dimiliki menjadi harta kekayaan dunia. Apakah kita mau itu milik kita sendiri, *ga* boleh dipunyai orang lain, tetapi mati atau boleh dimiliki orang lain dan menjadi harta kekayaan dunia. *Kan* kita bangga juga menyumbang kepada dunia. *Nah*, ini makin ada, ya. Makin banyak memiliki makin karena itu kita jangan terlalu pelit, ya, lalu merasa ada primordialisme. Ini cuma punya orang yang *member* saja. Ini cuma punya ini, *gitu, ya*. Jadi primordial, jadi eksklusif, *gitu, ya*. Kalau *ga* begini, Anda bukan orang Banyumas *ga* boleh bahasa Banyumasan, *gitu, ya*. Misalnya, *gitu, ya*. Indonesia ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan Malaysia jauh hebat karena apa? Orang kita ada orang Batak yang bahasa Jawanya kental karena belajar di Yogya, kawin sama orang Padang, *gitu, ya*. Tinggalnya di mana, itu Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana kita mempromosikan rasa memiliki sastra. *Nah*, itu *kan*.

Apakah kita sudah mengadakan penerjemahan silang dari satu bahasa ke bahasa lain? Belum, *kan, gitu, ya*. Apakah kita sudah mempromosikan pelajaran bahasa daerah untuk pembelajar baru yang bukan orang situ? Orang Batak belajar bahasa Sunda, orang Sunda belajar bahasa Alor, orang, *kan* ini *jadi* Indonesia. Itulah yang menjadi Indonesia, iya, *kan? Makin* banyak, lalu, insentifnya *ga? Kalau* kamu, kalau di United Nation itu, UNESCO dan sebagainya. Kalau orang punya bahasanya lebih banyak, bahasa yang sudah resmi di sana, gajinya lebih tinggi. *Nah*, di kita ada *ga* seperti itu? Seperti Asian Games itu *lho*, iya, *kan? Yang* menang itu *kan* dikasih itu *kan. Kenapa ga* untuk sastra dan bahasa daerah seperti itu. Bisa lima bahasa daerah, waduh, dapat gajinya lebih tinggi *gitu, ya*, karena dia *kan* bisa berkomunikasi dengan banyak orang, iya *kan? Mestinya* dibuat *policy/kebijakan* seperti itu, ya, di Badan Bahasa, ya. Nanti kalau pegawainya bahasanya banyak, lebih tinggi, ya, kasih, ya, insentif, ya. *Lho kok* pesimis begitu. *Oke*, lalu tadi itu



seperti kata Mas itu, memanfaatkan teknologi digital. Anak-anak *pakai* gawai apa kata tadi itu? Siapa namanya yang dari Australia? George Quinn bilang jangan dilarang. Gawai itu dimanfaatkan sehingga anak-anak merasa dekat.

*Nah*, kalau kita ... bahasa dan sastra mesti begini *pakai* begini *ga* boleh *pakai* gawai. Jadi, dia merasa *jadul* amat *sih*, *gitu*, *ya*, tetapi nanti kita akan tunjukkan yang itu tadi bagaimana teman-teman ada teman-teman di satu kelompok yang punya kemampuan ekonomi, dia membuat *game* berdasarkan sastra Nusantara. Jadi, *game*, mainkan di gawai. *Nah*, memang bentuknya jadi aneh, ah, *ga kayak gini kok*. Wah, ini di luar pakem ini. *Ga* boleh. Misalnya, *gitu*. Ya berhenti. *Kok kayak Jepang*. Modelnya *kok kayak* anime Jepang? *Ga* boleh ini. Ini *ga* Jawa. *Ga* Sunda. Ya berhenti. Biar saja agak mirip-mirip anime. *Ga papa*, *gitu*, *ya*. Biarkan dia memiliki. *Nah*, itu mungkin lain. Kalau mau *nonton* wayang ada wayang yang asli, tetapi, ya, kalau mau *nonton* yang seperti itu, ya, silakan, ya. *Nah*, aktornya siapa? Negara, Badan Bahasa, kita semua, masyarakat, Pak Ayip Rosidi, boleh, tetapi kita semua ikut. Kalau *ga*, *ga* jadi gerakan. Cuma jadi proyek. *Nah*, proyek dapet *duit* selesai, sudah, *nutupnya* bulan Oktober ini, terus pertanggungjawaban, *lah* tahu ini nada-nadanya. Jadi, bukan proyek di atas kertas. Nanti mau meneliti ini teman-teman kasihan sekali ini saya sedih. Meneliti, oh, cuma boleh, dia meneliti dia menemukan ada dua puluh, tetapi boleh cuma lima. *Lha* di situ ada dua puluh, bolehnya cuma lima. Jadi *kan* penelitiannya jadi penelitian yang administratif, iya *kan*. Itu. Jalan ke sananya satu hari, pulangnya satu hari, semuanya hanya butuh tiga hari. Ya cuma duduk sampai situ cuma capai *doang*, belum wawancara belum apa sudah harus pulang lagi, ya. Untuk itu, harus diubah *mindset*, cara berpikir kita yang harus diubah, ya.

Masyarakatnya kita masyarakat Nusantara ini terkenalnya itu inklusif. Budaya apa saja masuk, agama saja masuk sini semua, di sini jadi hidup dan berkembang. Orang belajar dari kita. Islam belajar dari kita. Budha belajar dari kita. Hindu belajar dari kita, ya. Inklusif, terbuka, dan gotong royongnya ini. Saya sangat iri pada iklan Sanco. Udah pernah liat, saya *ga* sempat ini, iklan Sanco yang untuk Badan Bahasa ini khusus untuk bulan Oktober. Bisa dicari iklan Sanco. Jadi, dia makan gratis, *yuk*. Coba nanti dicari di whatsapp, ya. Itu ada mesin *gitu*, *ya*, mesin, jadi iklannya itu ada mesin, ada bahasa-bahasa. Minyak Sanco, ya. *Iya*. *Nah*, itu ada di situ semacam mesin *gitu*, lalu ada bahasa-bahasa lalu kalau bisa, semua bahasa itu bisa, bisa, itu, dia boleh dapat makan gratis. Jadi, ada sekelompok orang, anak-anak *mencet* bahasa Bali, ayo makan itu apa, *gitu*, *ya*.

*Nah*, terus bahasa ini, kalau belum semuanya *ga* dapat makanan, akhirnya gotong royong. Orang Minangnya apa, akhirnya semua keluar itu. Bahasanya semua dapat, bahasa Bali, bahasa Batak, semua setelah semuanya ting ... ting ... ting ... nyala, *nah* mereka dapat makan gratis. Itu *kan* bagus *banget*. Artinya, gotong royong secara nasional, bahasa-bahasa penting, *kok* orang dari *jualan* bisa *ngerti* begitu *kok* kita yang di budaya ya, di Badan Bahasa, di UI, di Atmajaya, di Trunojoyo, masa kalah sama yang *jualan* minyak goreng, iya, *kan*? *Aduh*, *gimana* ini. Jadi, kita *ga* boleh kalah. *Oke*-lah mereka bagus, kita tiru lebih bagus lagi. Caranya *gimana* supaya semua saling gotong royong *ga* peduli orangnya Sunda atau tidak, tetapi ketika dia bisa *ting*, *nah*, dia menyumbang *kan*? *Ga* peduli orangnya apa, ya. *Nah*, jadi saling, bukan saling bersaing, bukan arogansi profesi, oh, saya dosen lebih pintar dari penutur. Bukan, ya. Arogansi, primordial, itu yang harus kita atasi saat ini, ya. Karena kepemilikan budaya ini kalau ini bisa diatasi



majulah semua budaya dan sastra kita. Lanjut. *Nah*, jangan lupa ini bukan, jadi kita terbuka kepada kreasi baru. Sastra dan budaya Nusantara ini bukan masa lalu, masa kini, dan masa depan, *gitu, ya*. Ini ada ... di Singapura, masa orang Inggris *sih* yang *bikin, kok* bukan orang kita, *ya*. Trus ada drama bahasa daerah di Prambanan barusan ini, apa, *ya*, namanya, judulnya saya lupa, yang di Prambanan ada pertunjukan, tetapi nama pertunjukannya *ga* ini, asing *gitu*.

Kisahnyanya itu kisah asing, tetapi dalam bahasa-bahasa daerah. *Barusan* ada. Bulan lalu. Saya lupa judulnya. *Nah*, kita harus menuju gotong royong Nusantara, temanya ini. Gotong royongnya bukan gotong royong zaman orde baru, *ya*. Yang harus dipaksa dari atas ke bawah, *gitu*, tetapi dengan sukarela, dengan semangat, dan dengan senang, dengan riang gembira, *gitu, ya*. Jadi, dengan bahasa, kalau bahasa dan sastra Nusantara maju, Indonesia memperkaya dunia, *ya*. Coba Mas itu gambar, mungkin kita tidak terlalu senang dengan apa dengan gambarnya. *Ga* cocok. Wah, ini selernya *kok* selera begini *ya*, Nusantara ini. *Kok, lha mosok kayak gini game-nya, gitu, ya*. Namun, boma saja dari boma, inspirasi dari bomakawiyah dan mereka meneliti dulu naskah-naskah ini sebelum membuat tokohnya. Paling *ga* mereka baca naskah-naskah itu, anak-anak ini, *iya, kan?* Tahu nama tokohnya. *Kok* Jepang-Jepang *banget gitu lho, ya*. Biar *aja* mereka membaca *kan* begitu. Lanjut. Itu namanya Bomanakasura. Bomanakasura, *kan?* Itu juga suatu invensi. Kemudian, ini apa permainan Majapahit, *ya*. Satriawarna *gitu, ya*. Kemudian apa *gitu, ya*. *Nah*, ini apa ini? Legenda Naga, *ya*. Walaupun banyak Cinanya, *tapi* nanti ada Indonesianya juga. Jadi, memang ini kreasi anak muda. *Tapi*, bahwa anak muda mau membaca naskah yang dulunya hanya punya orang filologi saja begitu, *ya*. Dia bilang, *ya*, itu *kan* suatu yang menarik, bahwa mereka memanfaatkan teknologi, jadi, *ya, gitu*. Kita mungkin tidak seperti ini caranya, Mas Iqbal dengan caranya sendiri meneliti, Badan Bahasa dengan caranya sendiri bikin antalogi, teman-teman sastrawan menulis dalam karya sastranya, Pak Miki *ngapain*, semua dengan cara yang berbeda-beda. Namun, kita menyumbang bersama sehingga terjadi, silakan sehingga kita menjadi bangga. Bangga karena Indonesia kalau disuruh bersaing dengan negara lain yang menang itu budayanya. *Ga* ada sekaya kita budayanya. Secair, sebegitu ramahnya kita dengan melintas budaya. Jadi, jangan kemudian kita ikut-ikutan yang menjadi asing, menjadi mengambil budayanya orang lain, lalu kehilangan apa yang kita punyai begitu *kayaknya*. Terima kasih.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 4 Kelompok 1**

Pembicara : Prof. Dr. Melani Budianta  
Judul Makalah : “Penelitian Keekerabatan Bahasa dan Sastra Daerah di Indonesia”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 13.45—15.15  
Moderator : Dr. Sastri Sunarti  
Pencatat : 1. Dina Alfiyanti Fasa  
              2. Ibnu Kharish

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Memajukan bahasa dan sastra Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kemajuan bahasa dan sastra Nusantara.
2. Keekerabatan yang dimaksud adalah sinergi dan penguatan satu sama lain sehingga dunia diperkaya oleh kekayaan budaya melalui bahasa dan sastra di Nusantara.
3. Istilah sastra di Nusantara digunakan untuk menghilangkan dikotomi sastra Indonesia dan daerah sebagai pusat dan pinggiran, utama dan penunjang, kanon dan bukan kanon, nasional dan terbatas, hierarkis, serta kapital budaya tidak seimbang sehingga pengetahuan dan dukungan terhadap sastra daerah terbatas.
4. Banyak penelitian yang sudah ada tentang sastra daerah serta produksi dan pendukungnya.
5. Bahan-bahan bahasa dan sastra daerah dapat didapatkan dalam bentuk sastra lisan, media massa berbahasa daerah, dsb.
6. Sastra mempunyai dinamika dan kehidupannya sendiri, bukan sekadar sebagai bahan penelitian bahasa. Sastra justru merupakan bentuk tertinggi ekspresi bahasa.
7. Keekerabatan sastra Nusantara dapat dilihat melalui motif-motif yang sama dan tema-tema tertentu.
8. Dari keekerabatan tersebut, penelitian lintas disiplin dan lintas daerah untuk sastra lisan/tulisan dapat dilakukan.
9. Penelitian mengenai interaksi lintas budaya dan persilangan antarsastra Nusantara dan juga dengan sastra berbahasa Indonesia juga dapat dilakukan.
10. Melalui penelitian-penelitian tersebut konteks dan perkembangan sastra Nusantara yang tidak terisolasi dari dinamika lokal-global dapat ditemukan.
11. Salah satu metode penelitian yang dapat digunakan adalah metode humaniora digital.
12. Lokal, nasional, dan global saling bersinggungan yang melibatkan dinamika kuasa bahasa, konteks dan interaksi lokal-global, dan perkembangan gaya hidup, nilai, serta orientasi budaya.
13. Kepemilikan budaya dipertanyakan. Semakin banyak yang merasa memiliki kebudayaan, semakin kesusastraannya berkembang.





14. Cara mempromosikan rasa memiliki bahasa dan sastra Nusantara adalah dengan penerjemahan silang, pelajaran bahasa daerah untuk pembelajar baru, pemanfaatan teknologi informasi digital.
15. Aktor promosi adalah negara, pemerintah daerah, akademisi, budayawan, komunitas sastra, dan masyarakat.
16. Promosi yang dilakukan seharusnya merupakan gerakan budaya, bukan proyek.
17. Pola pikir harus diubah untuk menuju masyarakat yang inklusif dan terbuka serta gotong royong (bukan bersaing, arogansi, dan pengutamaan kepentingan).
18. Banyak kreasi baru yang bukan dibuat oleh masyarakat Indonesia sendiri.
19. Jika bahasa dan sastra Nusantara maju, Indonesia akan memperkaya dunia.

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Natalina Rimba  
Instansi : Mentari Grup

#### **Pertanyaan:**

Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu bahwa setiap orang memiliki peran dalam mempromosikan budaya Indonesia. Bagaimana cara mengenalkan sastra ke anak-anak?

#### **Jawaban:**

Kita harus membuat sastra dekat dengan kehidupan sehari-hari. Puisi dapat dihubungkan dengan lagu atau novel dikaitkan dengan narasi. Dengan teknik tersebut, mereka akan merasa dekat dengan sastra hingga kemudian dapat memproduksi tulisan atau opini dan karya sastra sendiri.

#### **Penanya 2**

Nama : Dad Murniah  
Instansi : Yayasan Cinta Sastra

#### **Pertanyaan:**

1. Kami mencoba menerbitkan cerita-cerita sastra Nusantara dalam bentuk digital. Apakah karya sastra yang diciptakan oleh penulis-penulis daerah disebut sebagai sastra daerah atau dapat disebut sebagai sastra Nusantara?
2. Kami pernah melibatkan sepuluh sastrawan untuk menuliskan kembali cerita dari Manasang. Modifikasi baru pun terjadi. Ada cerita yang ternyata tidak sesuai dengan pakem. Apakah cerita ini disebut sebagai sastra daerah, sastra Nusantara, atau sastra Indonesia?

#### **Jawaban:**

Karya sastra dapat berada di semua lokasi. Jangan terlalu khawatir karya yang dihasilkan keluar dari pakem karena karya tersebut adalah karya baru. Silakan berkreasi. Apa yang sudah ada akan tetap ada.

#### **Isu-Isu Penting:**

1. Kemajuan bahasa dan sastra Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kemajuan bahasa dan sastra Nusantara.



2. Sastra Nusantara harus selalu diproduksi untuk mempertahankan dan memperkaya sastra Nusantara dan sastra Indonesia.
3. Istilah sastra di Nusantara digunakan untuk menghilangkan dikotomi sastra Indonesia dan daerah sebagai pusat dan pinggiran, utama dan penunjang, kanon dan bukan kanon, nasional dan terbatas, hierarkis, serta kapital budaya tidak seimbang sehingga pengetahuan dan dukungan terhadap sastra daerah terbatas.
4. Sastra mempunyai dinamika dan kehidupannya sendiri, bukan sekadar sebagai bahan penelitian bahasa. Sastra justru merupakan bentuk tertinggi ekspresi bahasa.
5. Rasa kepemilikan budaya perlu dipromosikan melalui gerakan budaya dengan aktor promosi adalah negara, pemerintah daerah, akademisi, budayawan, komunitas sastra, dan masyarakat.



## 5. Pemetaan Bahasa di Kabupaten Gresik: Sebuah Kajian Dialektologi

### PEMETAAN BAHASA DI KABUPATEN GRESIK: SEBUAH KAJIAN DIALEKTOLOGI

*Language Mapping in Gresik Regency: Dialectology Studies*

**Ahmad Muzaki**

Universitas Negeri Jakarta  
ikazumdamha8@gmail.com

#### **Abstrak**

Kabupaten Gresik merupakan wilayah yang berbatasan dengan kabupaten-kabupaten yang menggunakan dialek berbeda. Pulau Madura dan Kota Surabaya di bagian timur, Kabupaten Lamongan di bagian barat dan Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto di bagian selatan, yang pada umumnya dialek-dialek ini disebut sebagai dialek Jawatimuran. Kabupaten Gresik memiliki tipografi yang unik, yaitu adanya Pulau Bawean yang menjadikan daerah tersebut terpisah secara geografis dengan daerah lainya. Selain itu, juga terdapat pegunungan kapur di pesisir utara dan daerah dataran rendah di bagian selatan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana situasi kebahasaan di Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan situasi kebahasaan di Kabupaten Gresik dengan kegiatan pemetaan bahasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah puputan lapangan dengan 246 daftar pertanyaan yang disebar di 40 titik pengamatan di 18 kecamatan di Kabupaten Gresik. Dari penelitian ini menunjukkan adanya dua penggunaan bahasa yang berbeda di Kabupaten Gresik dengan persentase hasil dialektometri sebesar 90,5%. Beberapa kosakata bahasa Jawa juga dikenal luas di Pulau Bawean yang pada umumnya menggunakan bahasa Madura, di antaranya, yaitu eson, emak, dan ijo.

**Kata-kata kunci:** dialektologi, Kabupaten Gresik, pemetaan bahasa

#### **Abstract**

*Gresik Regency is an area bordering with districts using different dialects; Madura Island and Surabaya City in the east, Lamongan regency in the west and then Sidoarjo and Mojokerto regencies in the south - which are commonly referred to as dialect of Jawatimuran. Gresik Regency has a unique typography, namely the existence of Bawean Island which makes the area is geographically separated with other areas. In addition, there are also limestone mountains on the north coast of Java island and lowland areas in the south. Based on this, the problem formulation in this research is how linguistic situation in Gresik Regency at this time. The purpose of this research is to explain the linguistic situation in Gresik Regency with the activity of language mapping. The method of study used in this research is field baiting with 246 questionnaires spread over 40 observation points in 18 sub-districts in Gresik regency. In this research, there are two different language usage in Gresik Regency with the percentage of dialectometry result of 90.5%. Some Java language vocabularies are also widely known in Bawean Island which generally use Madura language, such as eson, emak, and ijo.*

**Keywords:** *dialectology, Gresik Regency, language mapping*



## PENDAHULUAN

Bahasa pada hakikatnya adalah lambang bunyi yang bersifat arbitrer, hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Sifat arbitrer pada bahasa ini tidak memperlmasalahkan mengapa kata lambang bunyi [*pisang*] dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menyatakan ‘Sejenis buah berkulit kuning dengan daging putih di dalamnya dan memiliki rasa manis’. Bahasa dalam hakikatnya yang bersifat arbitrer juga tidak dapat menjelaskan mengapa konsep ‘Sejenis buah berkulit kuning dengan daging putih di dalamnya dan memiliki rasa manis’ dalam bahasa Indonesia disebut sebagai [*pisang*], tetapi dalam bahasa Sunda disebut sebagai [*papaya*], sedangkan dalam bahasa Jawa disebut sebagai [*gḍandang*]. Kearbitreran sebuah bahasa juga mengakibatkan sebuah bahasa memiliki lebih dari satu lambang bunyi untuk menyebut satu konsep yang sama. Dalam bahasa Indonesia, misalnya, untuk menyebutkan konsep tubuh yang lebih besar dari ukuran normal disebut sebagai [*gḍemuk*], [*gḍandut*], [*gḍambul*], [*gḍontong*] dan [*gḍambrot*]

Adanya berbagai macam lambang bunyi untuk menyatakan satu konsep yang sama, dalam tataran ilmu bahasa disebut sebagai ragam atau variasi bahasa. Adanya ragam atau variasi bahasa dapat ditentukan oleh beberapa hal di antaranya disebabkan oleh (1) letak geografis, (2) tata tingkat dalam masyarakat (undak usuk), dan (3) profesi tiap-tiap kelompok penutur dalam batas-batas yang saling mengerti<sup>1</sup>. Namun, dalam penelitian ini hanya akan memfokuskan ragam dan variasi bahasa yang disebabkan oleh letak geografis atau yang sering disebut sebagai *dialek*.

Mengingat kembali pendapat Moeliono tentang pemerian bahasa bahwa kegiatan pemerian bahasa-bahasa daerah itu, antara lain, demi pengembangan teori linguisitik. Namun, sebaliknya dapat dilihat pula sejauh mana sumbangan pemetaan bahasa bagi pengembangan teori linguisitik. Peta bahasa yang dihasilkan dari kegiatan pemetaan bahasa dapat dimanfaatkan hampir di setiap bidang pengembangan kajian ilmu linguisitik di Indonesia. Dalam bidang fonologi, misalnya, dapat diketahui fonotatik suatu bahasa atau dialek tertentu melalui peta-peta perubahan bunyi dan korespondensinya terhadap bahasa atau dialek yang lain.<sup>4</sup> Adanya peta bahasa juga sangat membantu bidang ilmu linguisitik historis komparatif dalam mempermudah rekonstruksi bahasa proto dari bahasa-bahasa di Nusantara. Sebagaimana diketahui, sampai saat ini pengelompokan bahasa-bahasa di Nusantara belum dapat dilaksanakan karena kemiripan kata-kata kerabat di antara bahasa-bahasa tersebut.

Namun, kegiatan pemetaan bahasa di Indonesia tampaknya masih sulit untuk dilakukan. Di samping membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit, pemetaan bahasa juga sering kali terhalang oleh kondisi daerah pengamatan yang memang sulit untuk dijangkau oleh peneliti. Hal inilah yang kemudian menyebabkan sedikit sekali penelitian mengenai pemetaan bahasa di Indonesia. Pusat Bahasa sendiri baru selesai melakukan pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia setelah sebelumnya melakukan penelitian selama kurang lebih lima belas tahun dan baru selesai dibukukan pada tahun 2008. Urgensi dan kebutuhan akan pemetaan

---

<sup>4</sup> Chaer, Abdul dan Agustina, Leonie, Sosioloinguisitik ; Perkenalan awal, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), hlm 1



bahasa di Indonesia inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk melakukan sebuah penelitian *Pemetaan Bahasa Jawa di Kabupaten Gresik: Sebuah Kajian Dialektologi*.

Penelitian kebahasaan di Kabupaten Gresik juga sempat menjadi bahan kajian dalam penelitian oleh beberapa penelitian dialektologi, di antaranya, dilakukan oleh Yosi Rosa Adha (2011) yang melakukan penelitian dialek dengan judul *Bahasa Jawa Dialek Gresik di Kabupaten Gresik*. Hal serupa juga dilakukan Tri Yuniar Rosinawati (2011) dengan meneliti ragam bahasa yang digunakan oleh masyarakat daerah Kabupaten Gresik bagian pesisir pantai, dengan daerah Kabupaten Gresik di bagian kota. Membandingkan dua isolek masyarakat Gresik yang berbeda tempat juga dilakukan Oleh Hajah Intiyas (2013) dalam sebuah penelitian dengan judul *Bahasa Jawa Gresik dialek Lumpur di Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik Jawa Timur: Kajian fonologi, Morfologi, dan Semantik*. Penelitian ini memberikan fokus kepada dialek yang terdapat di Kelurahan Lumpur, Kecamatan Lumpur, Kabupaten Gresik. Namun, pemetaan bahasa Jawa di Kabupaten Gresik sampai saat ini belum pernah dilakukan. Hal inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk membuat sebuah kajian tentang *Pemetaan Bahasa Jawa di Kabupaten Gresik: Sebuah Kajian Dialektologi*.

Adapun Kabupaten Gresik dipilih sebagai tempat penelitian karena peneliti menganggap Kabupaten Gresik merupakan wilayah yang unik. Di bagian utara wilayah Kabupaten Gresik seperti Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Panjeng, dan Kecamatan Tambak adalah daerah pesisir pantai, sedangkan di bagian selatan adalah daerah perbukitan yang dingin. Di bagian timur Kabupaten Gresik berbatasan langsung dengan Kota Surabaya yang dikenal dengan dialek Suroboyoan-nya. Di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan yang mempunyai dialek khas yang oleh masyarakat setempat menyebutnya sebagai *bosoh kulonan*. Tidak hanya itu saja, wilayah seperti Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto yang kental akan kebudayaan Majapahit juga memberikan warna tersendiri bagi variasi dialek di Kabupaten Gresik. Keistimewaan selanjutnya adalah kehadiran *Giri Kedaton* sebagai suatu bekas kerajaan kecil yang didirikan oleh Sunan Giri. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat di sekitar Giri Kedaton dianggap memiliki derajat yang tinggi daripada bahasa di wilayah Kabupaten Gresik lainnya. Selain itu, adanya Kecamatan Tambak dan Sangkapura di Pulau Bawean sebagai salah satu wilayah administrasi Kabupaten Gresik menjadi hal menarik yang dapat diteliti selanjutnya, mengingat kecamatan ini merupakan satu-satu wilayah yang menggunakan bahasa Madura. Hal ini tentu menjadi suatu kajian yang menarik untuk diteliti dalam kajian dialektologi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian kebahasaan dan pemetaan bahasa di Kabupaten Gresik. Peneliti ingin mengetahui bagaimana situasi kebahasaan di Kabupaten Gresik dengan kondisi alam dan situasi budaya saat ini.

## LANDASAN TEORI

Dialektologi berasal dari kata Yunani *dialektos*. Istilah dialektos pada mulanya digunakan orang-orang Yunani untuk menyebutkan sebuah keadaan bahasa mereka yang berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak menyebabkan mereka merasa mempunyai bahasa yang berbeda, tetapi mereka masih tetap bisa saling memahami satu sama lain dengan dua bahasa mereka yang berbeda itu.



Dalam tataran linguisitik, dialektologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan sebuah *dialek* dalam suatu bahasa. Dialek dapat juga diartikan sebagai sistem kebahasaan yang dipergunakan oleh suatu masyarakat lain, yang bertangga yang mempergunakan sistem yang berlainan walaupun erat hubungannya<sup>5</sup>.

Ketika membahas tentang dialektologi, kita juga akan membahas tentang ragam atau variasi bahasa. Satu bahasa dapat memiliki satu bahkan lebih ragam atau variasi bahasa. Adanya ragam atau variasi bahasa ini kemudian dapat ditentukan oleh beberapa hal, di antaranya, (1) letak geografis, (2) tata tingkat dalam masyarakat (undak usuk), dan (3) profesi tiap-tiap kelompok penutur dalam batas-batas yang saling mengerti. Variasi bahasa yang ditentukan oleh letak geografis inilah yang disebut sebagai *dialek*. Selanjutnya, yang dimaksud dengan dialektologi adalah ilmu yang mengkaji tentang perbedaan-perbedaan isolek dengan memperlakukan perbedaan tersebut secara utuh<sup>6</sup>.

Usaha untuk memvisualisasikan data lapangan tersebut ke dalam bentuk gambar lazim disebut sebagai pemetaan bahasa. Kedudukan dan fungsi peta bahasa dalam dialektologi menurut Mahsun terbagi menjadi dua fungsi. Pertama, peta bahasa berfungsi untuk memvisualisasikan data lapangan agar data tersebut tergambar dalam prespektif yang bersifat geografis. Kedua, untuk memvisualisasikan pertanyaan umum yang dihasilkan berdasarkan distribusi geografis perbedaan-perbedaan (unsur kebahasaan) yang lebih dominan dari wilayah ke wilayah yang dipetakan<sup>7</sup>. Dengan adanya peta bahasa, data lapangan yang sudah terkumpulkan akan lebih muda untuk dibaca dan dipahami. Dalam dialektologi terdapat dua jenis peta bahasa, yaitu peta peragaan (*display map*) dan peta penafsiran (*intepretatif map*). Peta peragaan adalah peta yang berisi data-data yang diperoleh dari setiap titik pengamatan. Peta penafsiran adalah peta yang memuat akumulasi pernyataan-pernyataan umum tentang distribusi perbedaan-perbedaan unsur linguistik yang dihasilkan dari peta peragaan.

Pengisian peta peragaan dapat dilakukan dengan berbagai macam sistem, yaitu; (1) sistem lambang, (2) sistem langsung, dan (3) sistem petak. Sistem langsung dilakukan dengan memindahkan setiap berian atau data lapangan ke atas peta. Cara ini dianggap paling ideal dan mudah, tetapi kadang-kadang cara ini tidak dapat dilakukan jika daerah penelitian terlalu luas atau berian yang terkumpul terlalu banyak ragamnya di satu tempat. Sistem lambang dimaksudkan untuk mengatasi kesukaran teknis tersebut, dengan jalan mengganti berian itu dengan lambang-lambang tertentu. Berian yang sama atau dianggap bersumber kepada satu bentuk dasar yang sama harus diusahakan agar dinyatakan dengan lambang yang sama pula, dengan beberapa perbedaan kecil pada setiap lambangnya. Sistem petak lebih banyak memuat gambar dan ilustrasi. Sistem ini cocok digunakan dalam pembuatan atlas entografi. Ilustrasi tersebut bisa berupa, gambar, bagan atau potret-potret

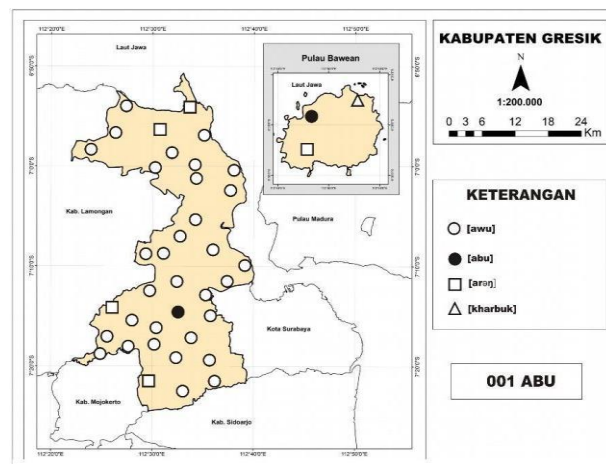
---

<sup>5</sup> Weijnen, dkk. (Penyunting). *Atlas Linguarum Europeae: Introduction*. ASEAN: Van Gorkum.

<sup>6</sup> Mahsun. 1995. *Dialektologi Diakronis: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiy Press. (hlm. 11).

<sup>7</sup> Mahsun. *op.cit.* hlm. 58.

benda yang ditanyakan<sup>8</sup>. Berikut contoh salah satu visualisasi data ke dalam bentuk peta lambang.



**Gambar 1 Contoh Visualisasi Data ke dalam Bentuk Gambar/Peta Lambang**

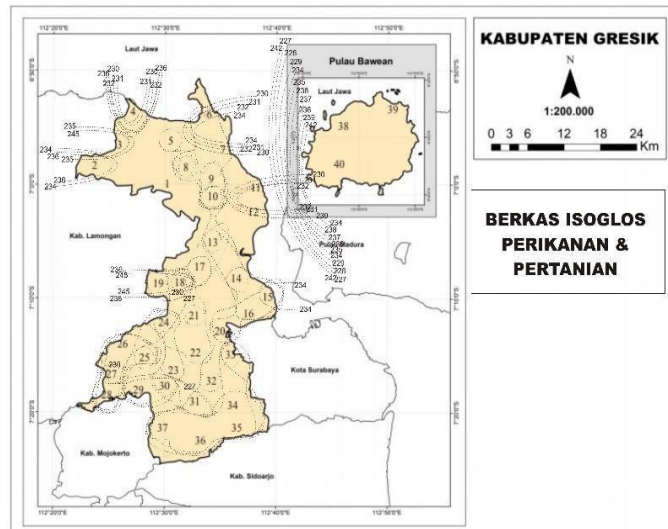
### Isoglos dan Berkas Isoglos

Isoglos atau garis *watas kota* adalah garis yang memisahkan dua lingkungan dialek dan bahasa, di antaranya, adalah keadaan alam, suku bangsa, keadaan politik, agama, kebudayaan, ekonomi, komunikasi, dan kesediaan masyarakat untuk menerima pengaruh dari luar<sup>9</sup> (Dubois dalam Ayatrohaedi). Yang perlu diperhatikan dalam membuat garis isoglos ke dalam peta adalah dengan menyatukan berian yang mempunyai gejala kebahasaan yang serupa dengan bentuk melengkung atau lurus dan digambar di antara dua titik. Selain itu, dengan mendahulukan berian yang daerah sebarannya paling luas. Heteroglos dan isoglos dalam beberapa penelitian dialektologi sering dianggap sebagai hal yang sama karena ketika mencoba untuk membuat sebuah garis isoglos, secara otomatis kita juga akan mendapatkan garis heteroglos. Beberapa penelitian dialektologi juga tidak mempermasalahkan hal ini.

Himpunan berkas isoglos dan heteroglos yang terkumpul dibuat dalam satu peta dasar disebut sebagai berkas isoglos. Cara membuat berkas isoglos adalah sebagai berikut. Pertama, dengan mengelompokkan peta-peta bahasa berdasarkan pola isoglosnya, jumlah etimonya, atau medan maknanya. Kedua, dengan menyalin semua isoglos dari satu kelompok tertentu atau acak pada sebuah peta dasar. Pengelompokan semua isoglos dari setiap peta bahasa menghasilkan berkas isoglos.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 52.

<sup>9</sup> Ayatrohaedi, .op.cit, hlm 5



**Gambar 2 Berkas Isoglos**

### Dialektometri

Dialektometri adalah salah satu metode yang digunakan dalam analisis atau penentuan isolek sebagai suatu bahasa, dialek, atau subdialek. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghitung jumlah seluruh beda kosakata antardaerah pengamatan dengan daerah terdekatnya. Istilah dialektometri pertama kali dikenalkan oleh Seguy (1973), sebagai ukuran statistik yang digunakan untuk melihat seberapa jauh perbedaan dan persamaan yang terdapat pada tempat-tempat yang diteliti, dengan membandingkan sejumlah bahan yang terkumpul dari tempat tersebut. Perhitungan dialektometri dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut.

$$\frac{(S \times 100)}{n} = d\%$$

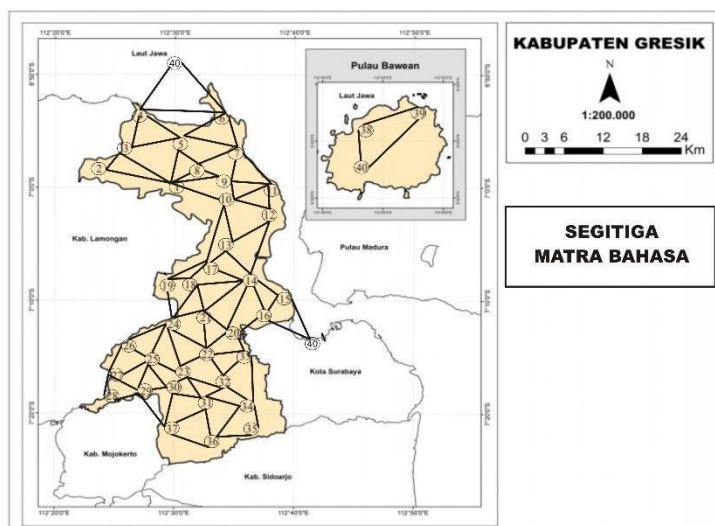
Keterangan :

S = Jumlah beda dengan daerah pengamatan lain  
 n = Jumlah peta yang dibandingkan

d = Jarak kosakata dalam persentase

Ketentuannya sebagai berikut: jika perbedaannya hanya mencapai 0–20%, dianggap tidak memiliki perbedaan, 21–30% dianggap perbedaan wicara, 31–50% dianggap perbedaan subdialek, 51–80% dianggap perbedaan dialek, dan 81–100% merupakan perbedaan bahasa. Untuk mempermudah perhitungan dialektometri, digunakan segitiga matrabahasa. Segitiga matrabahasa merupakan garis penghubung antartitik pengamatan dengan daerah terdekatnya. Garis tersebut dibuat menyambung dan tidak boleh terputus. Jika titik pengamatan kemungkinan mempunyai lebih dari satu segitiga matrabahasa, dipilih salah satu.

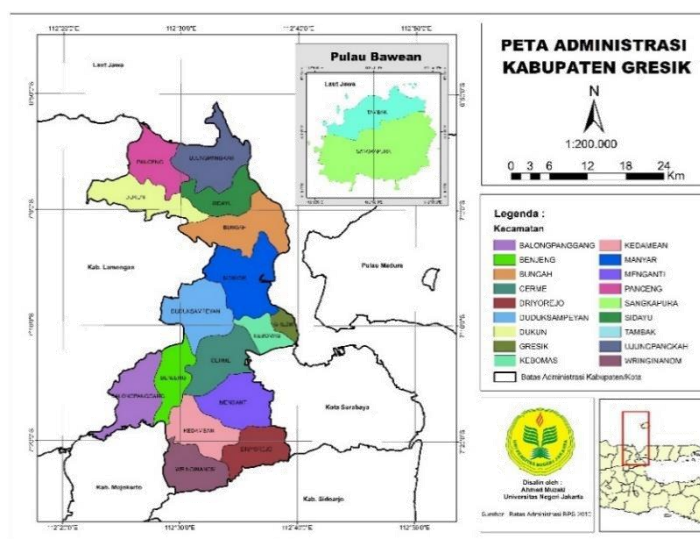




**Gambar 3 Contoh Segitiga Matra Bahasa**

### Profil Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Gresik terletak di antara 112°--113° BT dan 7°-8° LS. Di bagian timur, Kabupaten Gresik berbatasan dengan Kota Surabaya dan Pulau Madura dan di bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa. Di bagian selatan, wilayah Kabupaten Gresik berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. Di bagian barat, wilayah Kabupaten Gresik berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.



**Gambar 4 Peta Administrasi Kabupaten Gresik**

Pada umumnya wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah dataran tinggi dengan daerah dataran tertingginya yang terletak di Kecamatan Panceng dengan ketinggian 6.318 Mdpl. Secara administratif wilayah Kabupaten Gresik terdiri atas 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan. Berikut daftar kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik.

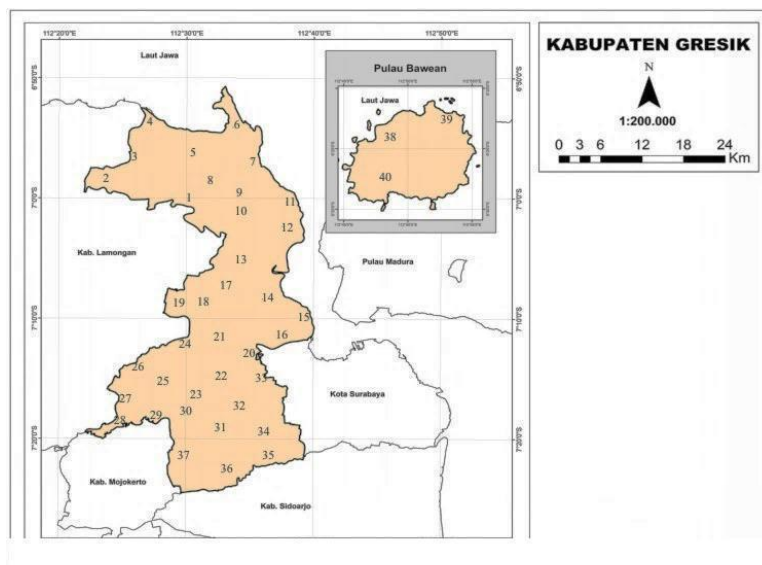


**Tabel 1 Jumlah Kecamatan yang Ada di Kabupaten Gresik (Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik 2016)**

No.	Kecamatan	Luas wilayah	Jumlah Dusun /Kelurahan
1	Dukun	59,03 km <sup>2</sup>	26
2	Balong Panggung	63,88 km <sup>2</sup>	25
3	Panceng	62,59 km <sup>2</sup>	14
4	Benjeng	61,26 km <sup>2</sup>	23
5	Duduk Sampeyan	74,29 km <sup>2</sup>	23
6	Wriginanom	62,62 km <sup>2</sup>	16
7	Ujung Pangkah	94,82 km <sup>2</sup>	13
8	Kedamean	65,96 km <sup>2</sup>	15
9	Sidayu	47,13 km <sup>2</sup>	21
10	Manyar	95,42 km <sup>2</sup>	23
11	Cerme	71,73 km <sup>2</sup>	25
12	Bungah	79,49 km <sup>2</sup>	22
13	Menganti	68,71 km <sup>2</sup>	22
14	Kebomas	30,06 km <sup>2</sup>	21
15	Driyorejo	51,3 km <sup>2</sup>	16
16	Gresik	5,54 km <sup>2</sup>	21
17	Sangkapura	118,72 km <sup>2</sup>	17
18	Tambak	78,7 km <sup>2</sup>	13
Jml		1.191,25 km <sup>2</sup>	356

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan dalam penghitungan dialektometri yang akan dijelaskan dalam pembahasan. Adapun metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menginterpretasi data yang sudah didapat dalam bentuk uraian dan penjelasan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada daftar 200 kosakata budaya dasar Morish Swadesh ditambah dengan kosakata tambahan. Pengambilan data dilakukan secara acak dan tersebar di 40 daerah titik pengamatan di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Adapun pemilihan daerah titik pengamatan diperoleh berdasarkan jarak antara tiap-tiap desa dan juga tingkat kepadatan penduduk. Untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan peta, tiap-tiap daerah titik pengamatan diberi nomor berdasarkan letak antardesa. Peta penomoran daerah titik pengamatan dapat dilihat sebagai berikut.



**Gambar 5 Peta Penomoran**

## PEMBAHASAN

### Bahasan Isofon dan Isoglos

Pada bagian bab ini akan dideskripsikan mengenai etima pada peta lambang yang termuat dalam bentuk tabel. Etima berasal dari daftar tanya yang terdiri atas kosakata dasar Morish Swadesh, jajanan pasar, peralatan dapur, perikanan dan pertanian. Terdapat 246 peta lambang yang terdiri atas 200 peta kosakata dasar Morish Swadesh, 10 peta jajanan pasar, 12 peta peralatan dapur, dan 19 peta perikanan dan pertanian. Kosakata jajanan pasar sengaja ditambahkan dalam daftar tanya karena diduga akan memunculkan variasi bahasa yang berlimpah, sedangkan kosakata perikanan dan pertanian ditambahkan mengingat mayoritas masyarakat Kabupaten Gresik bekerja sebagai petani dan petambak hal ini tentu akan memunculkan variasi kosakata yang khas di bidang tersebut.

Selanjutnya, gambar peta kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan etima yang dimiliki, yaitu satu etima, dua etima, tiga etima, empat etima, lima etima, enam etima, dan tujuh etima. Adapun beberapa kelompok etima tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

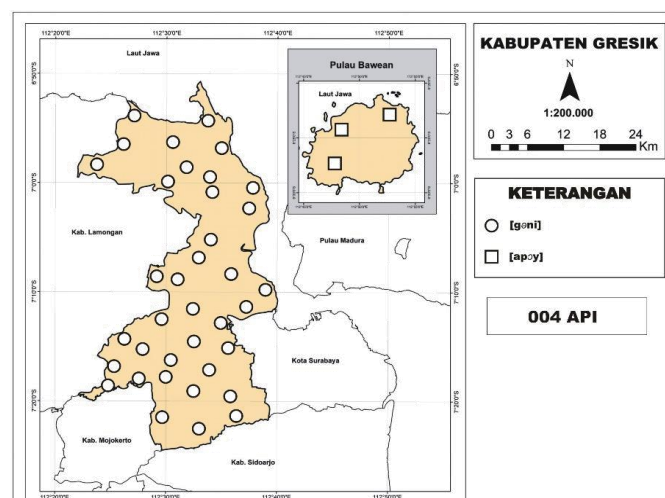
**Tabel 2 Kelompok Etima**

Etima	Satu	Dua	Tiga	Empat	Lima	Enam	Tujuh
Pelambang							
Satu	18	-	-	-	-	-	-
Dua	27	97	-	-	-	-	-
Tiga	6	13	29	-	-	-	-

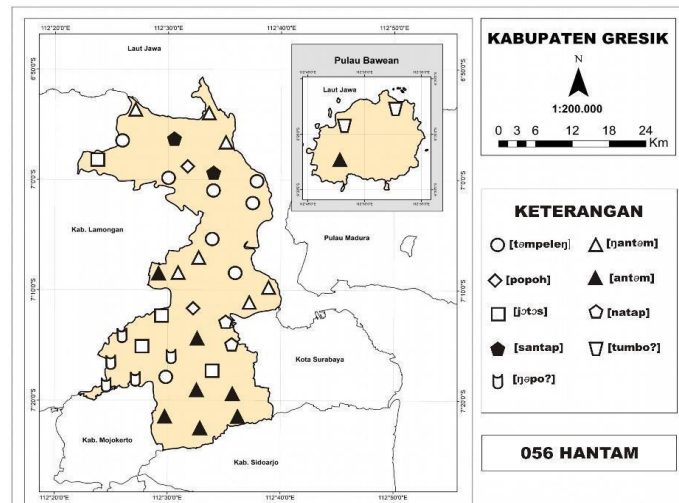
Empat	-	1	14	19	-	-	-
Lima	-	-	1	1	1	-	-
Enam	1	-	-	-	-	2	-
Tujuh	-	5	-	-	-	1	1
Sembilan	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah	52	116	44	20	1	3	2

Kelompok dua etima dua pelambang adalah kelompok etima yang paling mendominasi dengan peta lambang sebanyak 116 buah peta. Salah satu di antaranya adalah peta 044 ‘API’ yang mempunyai berian yang berbeda secara fonetik dan leksikal, yaitu *[gəni]* dan *[apɔy]*. Sementara itu, juga terdapat kosakata dua etima tiga pelambang. Adanya proses Epitensis memberikan pengaruh besar terhadap variasi bahasa pada kategori ini. Proses Epitensis itu, misalnya, tampak pada peta 018 ‘MATAHARI’ 073 ‘NAPAS’ dan 110 ‘BENAR’ yang masing-masing memunculkan berian *[sejeje]*, *[srejeje]*, *[ambəkan]*, *[ambəan]*, *[bhəndər]* dan *[bənər]*. Ada penambahan fonem /r/ di tengah kata *[sejeje]* sehingga muncul berian *[srejeje]*. Begitu juga dengan berian *[ambəkan]*, dan *[bhəndər]* yang sebelumnya mendapat penambahan fonem /k/ dan /h/.

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh peneliti mengenai etima dalam peta lambang, ditemukan paling banyak tujuh variasi bahasa dengan tujuh etima sembilan pelambang. Hal tersebut dapat dilihat pada peta 056 ‘HANTAM’ yang memiliki sembilan berian, yaitu: *[təmpeləŋ]*, *[jətəs]*, *[ŋantəm]*, *[antəm]*, *[natap]*, *[santap]*, *[popoh]*, *[ŋəpəʔ]*, *[tumboʔ]*.

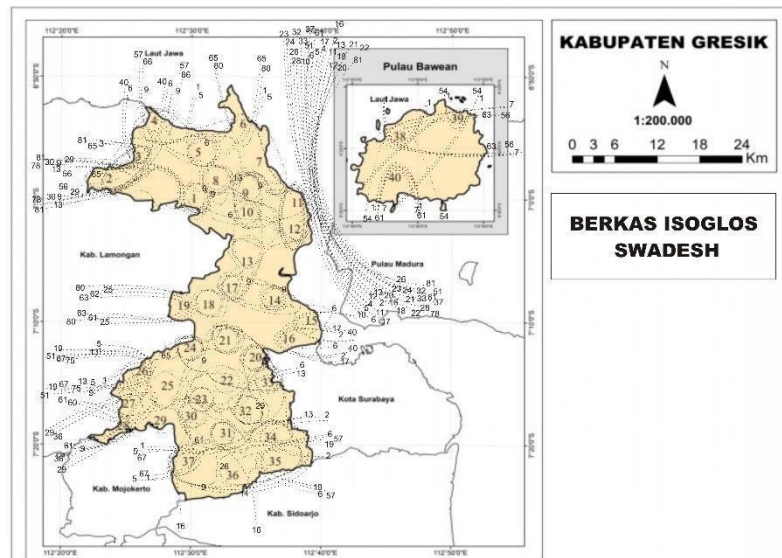


Gambar 6 Salah Satu Peta Dua Etima Dua Pelambang



**Gambar 7 Peta Tujuh Etima Sembilan Pelambang**

Selanjutnya, untuk mendapatkan visualiasi jarak bahasa yang komprehensif, dibutuhkan berkas isoglos. Berkas isoglos diperoleh dari penggabungan garis isoglos yang sudah dibuat dari tiap-tiap peta lambang. Berkas isoglos yang terkumpul kemudian dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu berkas isoglos kosakata dasar Morish Swadesh, berkas isoglos jajanan pasar, berkas isoglos peralatan dapur, dan berkas isoglos perikanan dan pertanian. Salah satu berkas isoglos tersebut dapat dilihat sebagai berikut.



**Gambar 8 Berkas Isoglos Kosakata Dasar Morish Swadesh**



Pada gambar peta berkas isoglos di atas, kita dapat melihat adanya penumpukan garis isoglos yang terletak pada daerah yang memisahkan Pulau Bawean dengan daerah lainya di wilayah Kabupaten Gresik. Data menunjukkan penumpukan terjadi akibat adanya penggunaan bahasa yang berbeda. Titik Pengamatan 38,39 dan 40 (Kecamatan Sangkapura dan Tambak) diketahui menggunakan bahasa Madura dan daerah di titik pengamatan lainnya (TP 1-38) menggunakan bahasa Jawa. Penumpukan juga terjadi pada TP 2, 3 dan 4 (antara wilayah Kecamatan Panceng dan Dukun) daerah tersebut merupakan wilayah paling ujung utara Kabupaten Gresik dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan bagian utara. Pada TP 34 dan 35 (Kecamatan Driyorejo) juga mengalami penumpukan sama halnya dengan TP 36 dan 37 di bagian selatan (Kecamatan Wriginanom). Hal ini terjadi akibat pengaruh penggunaan bahasa dari daerah sekitarnya. Kota Surabaya di bagian timur dan Kabupaten Sidoarjo di bagian selatan



## Perhitungan Dialektometri

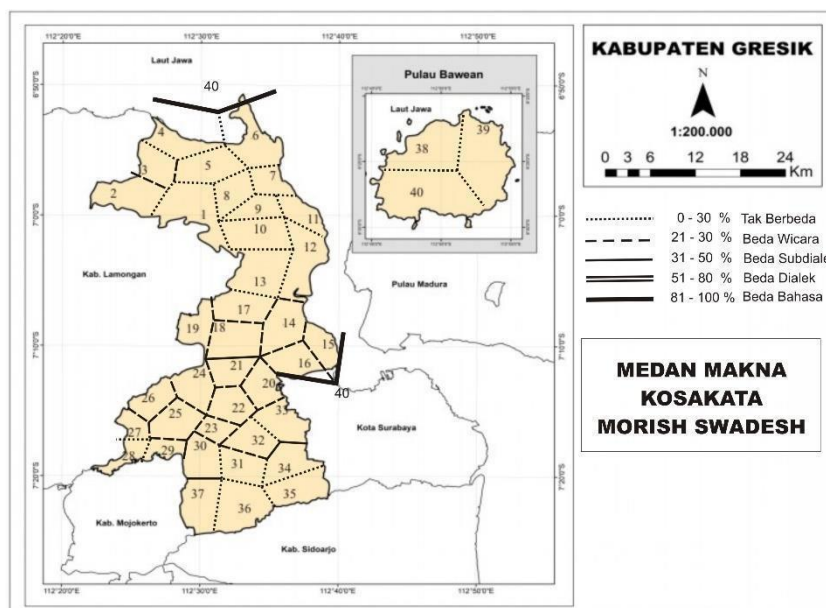
Tabel Dialektometri

Medan Makna Kosakata Budaya Dasar Morres Swadesh

Desa	%	Desa	%	Desa	%
1:2	13,5	13:14	11	23:32	20
1:3	18,5	14:17	16	24:25	10
1:5	18	14:18	25	24:26	16
1:8	14,5	14:20	15	25:26	14
1:10	17,5	14:21	17	25:27	13
2:3	22	15:16	14,5	25:29	11,5
3:4	10	16:20	14,5	25:30	14
3:5	22	17:18	25,5	26:27	15
4:5	19,5	17:19	27	27:28	15
4:6	18	18:19	23,5	27:29	12,5
5:6	9	18:21	30	29:30	12
5:8	18,5	18:24	27,5	30:31	14,5
5:7	12,5	19:24	16	30:37	12,5
6:7	6	20:21	13	32:33	14,5
7:8	11	20:22	13	32:23	20,5
7:9	12,5	20:33	13,5	32:34	14,5
8:9	16,5	21:22	17,5	33:34	19,5
9:10	16	21:24	16,5	34:35	9
9:11	15,5	22:20	14	34:36	10
10:11	15	22:23	11	35:36	10
10:12	16	22:24	15	36:37	8
10:13	14	22:33	21	38:40	5
10:17	19	23:24	12,5	39:40	3,5
11:12	5	23:25	12	40:4	89,5
12:13	17,5	23:30	15	40:6	90,5
12:14	19,5	23:31	17,5	40:16	89,5

Dari perhitungan dialektometri di atas diperoleh persentase perbedaan dengan nilai paling kecil 3,5% (Perbandingan antara TP 39:40) dan persentase terbesar 90,5% (Perbandingan antara TP 6:40). Data yang sudah didapat kemudian dipindahkan ke dalam bentuk gambar menjadi peta jaring laba-laba yang juga menunjukkan medan makna. Peta jaring laba-laba juga dikelompokkan menjadi

empat bagian, yaitu kosakata Morish Swadesh, jajanan pasar, peralatan dapur, perikanan dan pertanian. Di antaranya dapat dilihat sebagai berikut.



**Gambar 9 Peta Medan Makna Kosakata Morish Swadesh**

Secara keseluruhan peta jaring laba-laba menunjukkan situasi kebahasaan di Kabupaten Gresik yang menggunakan dua bahasa yang berbeda. Perbedaan penggunaan bahasa tersebut dapat dilihat dari adanya penebalan garis di wilayah utara (Kecamatan Pancen dan Ujung Pangkah) dan wilayah bagian timur (Kecamatan Gresik) dengan daerah di Pulau Bawean (Kecamatan Sangkapura). Wilayah Kabupaten Gresik nonpulau (TP 1-37) menunjukkan adanya gejala perbedaan bahasa di tingkat wicara. Hal tersebut dapat dilihat dengan garis putus-putus di bagian utara dan selatan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dari 246 daftar pertanyaan yang terdiri atas 200 kosakata dasar Morish Swadesh, jajanan pasar, peralatan dapur, perikanan, dan pertanian didominasi oleh kelompok kosakata dua etima dua pelambang dengan persentase sebesar 39,4% dari total keseluruhan dengan jumlah 97 glos. Kosakata satu etima berjumlah 52 buah, kelompok tiga etima berjumlah 44 buah, empat etima berjumlah 20 buah, lima etima berjumlah 1 buah, enam etima 3, dan tujuh etima berjumlah 2 buah.
2. Banyaknya varisai bahasa di Kabupaten Gresik dikarenakan adanya penggunaan dua bahasa yang ada di sana, yaitu bahasa Madura yang ada di TP 38,39 dan 40 (Wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak) dan bahasa Jawa yang digunakan di daerah lainya. Hal ini juga disebabkan oleh keadaan geografis wilayah Kabupaten Gresik yang dipisahkan oleh laut. Variasi bahasa juga disebabkan karena adanya proses pembentukan kata, seperti epistensis, aferisis, sinkop, metatesis, tingkat tutur, dan pengaruh dari bahasa Indonesia. Variasi





- bahasa juga disebabkan adanya penggunaan imbuhan  $\eta$  seperti pada berian [ɲeres] [ɲeres] [ɲosək] dll.
3. Di Kecamatan Sangkapura dan Tambak pada umumnya menggunakan bahasa Madura, tetapi dalam kesehariannya ada beberapa kosakata yang sudah terpengaruh oleh bahasa Jawa Gresik, seperti munculnya berian [əma?], [eson] dan [ijo].
  4. Tabel dialektometri menunjukkan jarak terbesar antara kecamatan di Kabupaten Gresik mencapai 90,5% yang ditemukan di antara TP 40 (Kecamatan Sangkapura) dan TP 6 (Kecamatan Ujung Pangkah). Berdasarkan rumus Guiter, persentase tersebut menunjukkan adanya penggunaan dua bahasa di Kabupetan Gresik. Meskipun demikian, penggunaan bahasa Jawa tetap mendominasi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Bahkan, hampir semua di antara titik pengamatan tidak ditemukan perbedaan. Adapun penggunaan bahasa Jawa di Kabupaten Gresik pada umumnya sampai pada taraf perbedaan wicara saja, di antaranya, terdapat di Kecamatan Dukun, Kecamatan Pancen, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Manyar, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Balong Pangang, dan Kecamatan Menganti. Selain itu, juga terdapat perbedaan subdialek yang terdapat di Kecamatan Wriginanom dan Kecamatan Manyar.
  5. Masyarakat Kabupetan Gresik pada umumnya menggunakan bahasa Jawa ngoko untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Masyarakat Gresik memiliki kekhasan dalam pelafalan fonem bunyi /e/ dan /ɛ/ yang kadang saling menggantikan. Ada pula ditemukan /u/ dan /o/ yang juga kerap kali saling menggantikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayatrohaedi. (1979). *Dialektologi: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Chaer, Abdul dan Agustina, Leonie. (2002). *Sosioloingusitik: Perkenalan awa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Fonologi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Krisnawan, Chandra. (2009). *Pemetaan Bahasa Jawa Dialek Surabaya di Kabupaten Sidoarjo: Kajian Dialektolog*. Skripsi FBS Unesa. Tidak diterbitkan.
- Lauder, Multamia R.M.T. (1993). *Pemetaan dan Distribusi Bahasa-Bahasa di Tanggerang*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Lestari, Menik. (2017). *Variasi Dialek Bahasa Jawa di Kabupaten Kendal: Kajian Dialektologi*. Skripsi FIB-UI. Tidak diterbitkan.
- Mahsun. (1995). *Dialektologi Diakronis: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Linguistik Historis Komparatif*. Yogyakarta: Gama Media.
- Robins, R.H. (1998). *Linguistik Umum: Sebuah Pengantar Seri ILDEP*. Yogyakarta: Kanisius.
- Putra, Tanjung Dwi. (2015). *Pemetaan Bahasa Jawa Dialek Surabaya di Kabupaten Sidoarjo: Kajian Dialektologi*. Skripsi FS-BI UNAIR. Tidak diterbitkan.
- Weijnen, dkk (penyunting). *Atlas Linguarum Europae; Introduction*. Asean: Van Gorkum



### **Referensi Daring**

Kecamatan Dalam Angka, <https://gresikkab.bps.go.id/publikasi.html> (Diunduh pada tanggal 1 Juni 2017)

Pemerintah Kabupaten Gresik–Kelurahan/ Desa di Kabupaten Gresik, [http://gresikkab.go.id/profil/kelurahan\\_desa\\_di\\_kecamatan\\_gresik](http://gresikkab.go.id/profil/kelurahan_desa_di_kecamatan_gresik) (Diunduh pada tanggal 9 Juni 2017)



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 4 Kelompok 4**

Pembicara : Ahmad Muzaki  
Judul Makalah: “Pemetaan Bahasa di Kabupaten Gresik: Sebuah Kajian Dialektologi”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 13.45—15.15  
Moderator : Drs. S.S.T. Wisnu Sasangka, M.Pd.  
Pencatat : 1. Purwaningsih  
2. Ferdinandus Moses  
3. Kunkun Purwati

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Kegiatan pemetaan bahasa bertujuan untuk mempermudah visualisasi data lapangan yang sudah didapatkan ke dalam bentuk gambar (peta).
2. Yang melatarbelakangi titik pengamatan penelitian bahasa di Kabupaten Gresik adalah bahwa beberapa kecamatan di Kabupaten Gresik dipisahkan oleh laut, yaitu kecamatan yang ada di Pulau Bawean.
3. Instrumen yang digunakan adalah 200 kosakata budaya dasar Moris Swadesh, jajan pasar, peralatan dapur, dan perikanan serta pertanian.
4. Dari 246 daftar tanya yang terdiri atas 200 kosakata budaya dasar Morish Swadesh, 10 kosakata bidang jajan pasar, 12 kosakata bidang peralatan dapur, dan 19 kosakata bidang perikanan dan pertanian yang menunjukkan adanya dominasi pada kelompok etima dua pelambang dengan persentase 39,4% dari keseluruhan 97 buah peta lambang.
5. Banyaknya variasi bahasa di Kabupaten Gresik disebabkan oleh penggunaan dua bahasa, yaitu bahasa Madura di TP 38--40 dan bahasa Jawa di daerah TP lainnya.
6. Ditemukan pengaruh bahasa Jawa di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak dengan ditemukannya kosakata *emak*, *eson*, dan *ijo*.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Usnul Fatonah  
Instansi : Universitas Esa Unggul

**Pertanyaan:**

1. Kendala apa yang Saudara hadapi dalam melakukan penelitian dialektologi?
2. Tentang perbedaan kata *watu* dan *batu*, bagaimana penjelasannya?

**Jawaban:**

1. Kendala yang saya hadapi adalah masalah pembiayaan yang terlalu besar karena transportasi untuk menuju wilayah penelitian sulit. Selain itu, saya juga harus menyeberangi Pulau Bawean dan itu juga berkaitan dengan dana dan tenaga serta waktu yang cukup memadai.



2. *Watu* dan *batu* merupakan bentuk korespondensi. Saya tidak tahu mana yang lebih dahulu, *watu* atau *batu*.

**Tambahan dari Ibu Multamia:**

Kasus *watu* dan *batu* harus melihat bahasa protoanya. Banyak kata yang mirip-mirip itu harus dilihat protoanya mungkin sebagai warisan bersama atau bentuk variasi dari sebuah kata. Penelitian ini butuh kesabaran yang tinggi.

**Isu-Isu Penting:**

1. Agar mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai situasi kebahasaan di Indonesia, peneliti perlu menuntaskan penelitian kekerabatan dan pemetaan bahasa-bahasa daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, sensus bahasa perlu dilakukan di tiap provinsi untuk memutakhirkan data jumlah penutur dan informasi status tiap bahasa.
2. Belum ditemukan satu penelitian pun yang mendeskripsikan lokasi suku-suku terasing di seluruh Indonesia secara lengkap dan komprehensif. Penjaringan data bahasa di lapangan dapat membantu pelacakan keberadaan mereka dengan cara meningkatkan jumlah desa sebagai titik pengamatan di tiap wilayah.
3. Diharapkan balai dan kantor bahasa di seluruh Indonesia serta pemda setempat dapat membantu melakukan cek-ricik keselarasan antara bahasa dan sastra yang telah dilakukan.
4. Tenaga ahli dialektologi sudah mulai berkurang. Sementara itu, kebutuhan ahli dialektologi diperlukan untuk menangani bahasa-bahasa di Indonesia yang cukup banyak. Badan Bahasa adalah instansi yang tepat untuk menangani hal ini. Oleh karena itu, perlu staf Badan Bahasa yang mengambil kuliah dialektologi.



## 6. Korespondensi dan Variasi Bunyi Bahasa-Bahasa Nusantara Mempermudah Belajar Bahasa

### KORESPONDENSI DAN VARIASI BUNYI BAHASA-BAHASA NUSANTARA MEMPERMUDAH BELAJAR BAHASA

*The Sound Correspondence and Variation of Nusantara's Languages to Simplify  
People Learning the Language*

**Yulia Esti Katrini dan Rangga Asmara**

Universitas Tidar

[yuliaestikatrini@untidar.ac.id](mailto:yuliaestikatrini@untidar.ac.id)

#### Abstrak

Bahasa Nusantara merupakan sekumpulan bahasa yang digunakan di kepulauan Nusantara, terutama wilayah negara Indonesia. Sudah banyak penelitian bahasa Nusantara dari segi sinkronis dan diakronis, tetapi masih sedikit yang mengkaji tentang korespondensi dan variasi bunyinya. Penelitian ini menemukan adanya korespondensi bunyi sebagai penanda hubungan kekerabatan sehingga mempermudah mempelajari bahasa Nusantara, terutama hubungannya dengan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dengan menggunakan metode komparatif eksploratif, dapat ditentukan bentuk-bentuk kebahasaan yang mempunyai korespondensi bunyi, baik secara fonologis, morfologis, maupun leksikal. Dari data terbatas pada kosakata dasar dan aktivitas, situasi kebahasaan di Nusantara masih menunjukkan bukti-bukti kekerabatan yang sangat erat. Adanya korespondensi bunyi pada kata-katanya telah mengarah pada induk bahasa yang sama meskipun terjadi inovasi, baik secara internal maupun eksternal suatu bahasa. Hal itu sesuai dengan wilayah pakai bahasa, kontak bahasa secara geografis, kontak bahasa karena migrasi dan transmigrasi sehingga terjadi pinjam-meminjam kata-kata tertentu untuk kebutuhan tertentu pula. Korespondensi bunyi terjadi pada sejumlah kata yang merupakan contoh data yang diambil dari medan makna yang meliputi kata bilangan, anggota tubuh, tentang alam, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, di samping kata-kata yang menunjukkan aktivitas serta kata sifat. Hal itu dipertimbangkan sebagai kata-kata yang pasti dimiliki oleh semua bahasa dan sulit berubah dalam waktu yang cukup lama. Pengetahuan korespondensi bunyi mempermudah belajar bahasa-bahasa di Indonesia.

**Kata-kata kunci:** korespondensi bunyi, variasi bunyi, bahasa Nusantara, bahasa Indonesia

#### PENDAHULUAN

Bahasa Nusantara adalah sekumpulan bahasa-bahasa yang digunakan di seluruh kepulauan Nusantara, terutama bahasa-bahasa yang digunakan oleh daerah-daerah yang menjadi wilayah Indonesia. Khazanah bahasa daerah di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Rote hingga Miangas. Dalam buku *Bahasa dan Peta Bahasa* (2017) yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) disebutkan bahwa jumlah bahasa daerah yang sudah diinventarisasi dan dideskripsikan sebanyak 652, tidak termasuk dialek dan subdialek. Di antara ratusan bahasa yang terdapat di Indonesia tersebut, dalam



rangka penyelenggaraan berbangsa dan bernegara diperlukan bahasa persatuan. Di Indonesia melalui Sumpah Pemuda 1928 diputuskan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang kemudian diberi nama bahasa Indonesia. Dalam perkembangan bahasa di wilayah ini ada bahasa yang mempunyai persamaan-persamaan, tetapi ada yang mempunyai perbedaan-perbedaan, contohnya untuk makna “satu” ditemukan bentuk *sada, asa, esa, sasa, seta, hiji, siji*, dan sebagainya.

Sejarah terbentuknya bahasa yang dipilih untuk berkomunikasi bersama mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu atau bahasa asal mereka, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sesungguhnya telah menjadi lingua franca selama berabad-abad di wilayah Nusantara ini, sebagai bahasa perhubungan terutama di dunia perdagangan.

Keluasan penggunaan bahasa Melayu di wilayah ini menyebabkan munculnya variasi-variasi bahasa yang dalam perkembangannya akan membentuk bahasa tersendiri di berbagai wilayah. Dalam perkembangan dan pertumbuhannya, bahasa sangat dipengaruhi dinamika masyarakat pemiliknya. Akan terjadi perkembangan unsur-unsur kebahasaan sesuai dengan tututan masyarakat yang menggunakannya, baik itu perkembangan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Karena fungsi utamanya sebagai alat komunikasi untuk keperluan interaksi sosial, bahasa dianggap sebagai produk sosial. Meskipun berkembang sesuai dengan dinamika masyarakatnya, bahasa-bahasa yang ada di Nusantara ini tetap menunjukkan adanya hubungan kekerabatan yang ditandai dengan persamaan-persamaan bunyi dan kosakatanya, seperti untuk makna “udang” ada kata *uro, udeueng, odang, udang, urang, hundang*, dan *udaang*.

Demi kepentingan pemahaman perkembangan bahasa di negeri ini, penelitian tentang adanya kekerabatan perlu dilakukan, terutama ketika diperlukan adanya kontribusi atau tidak untuk perkembangan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Banyak permasalahan yang perlu dikaji terkait dengan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dan bahasa daerah (bahasa Nusantara).

Penelitian tentang korespondensi ini pernah dilakukan oleh Ardana (2011) yang berjudul “Korespondensi Fonem Proto-Austronesia dalam Bahasa Kaili dan Bahasa Uma di Sulawesi Tengah”. Dalam penelitian tersebut dianalisis korespondensi fonem Proto-Austronesia dan dideskripsikan tipe-tipe perubahan bunyinya. Selain itu, Tiani (2010) juga membahas “Korespondensi Fonemis Bahasa Bali dan Bahasa Sumbawa” dengan melihat perubahan bunyi dari kedua bahasa tersebut. Sementara itu, Husain (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Korespondensi Bunyi Bahasa Bugis Dialek Soppeng dan Dialek Ennak (*Buginese Phonemic Correspondence of Soppeng and Ennak Dialects*)” mengkaji pola korespondensi fonemis bahasa Bugis dari dua dialek melalui rekurensi fonemis, kookurensi, dan analogi. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang membahas korespondensi fonem dari dua bahasa yang berbeda, penelitian ini membahas korespondensi dan variasi bunyi bahasa-bahasa Nusantara yang mempunyai kaitan sebagai lingua franca pada masa lalu, di antaranya, Aceh, Minangkabau, Nias, Batak, Jawa, Banjar, Bugis, Toraja, Ambon, dan Papua tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada korespondensi dan variasi bunyi apa saja yang terdapat pada bahasa-bahasa tersebut?

Pemahaman akan korespondensi bunyi akan membantu pembelajar bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di negeri ini, yang bahkan ke depan bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa ASEAN bersama dengan bahasa Melayu.



Korespondensi bunyi bahasa-bahasa ini juga ditemukan pada bahasa Tagalog di Philipina, misalnya, *ilong* “hidung” *olay* “udang” *palay* “padi”.

## LANDASAN TEORI

Masalah kebahasaan juga terjadi di Malaysia terkait dengan bahasa nasionalnya, demikian pula di Vietnam sehingga mereka harus memanfaatkan bahasa ibu untuk pembelajaran bahasa-bahasa lain. Pemahaman terhadap adanya korespondensi dan variasi bunyi pada bahasa-bahasa yang berkerabat dapat membantu bahasa lain. Penelitian tentang korespondensi bunyi dari bahasa-bahasa Nusantara tidak dapat lepas dari pemahaman bahasa Melayu sebagai asal bahasa Indonesia.

### 1. Permasalahan Bahasa di Beberapa Negara

Dressler (2014) menyatakan bahwa paradigma bahasa dapat menunjukkan identitas linguistik dari para pembelajar bahasa, khususnya anak-anak di Kanada. Identitas linguistik tersebut meliputi keahlian berbahasa, bersosialisasi dengan bahasa, dan kualitas berbahasa. Identitas linguistik akan memberi kontribusi positif, seperti pembelajar anak-anak tentang perkembangan emosi sosial dan pendidikan. Aspek berbahasa dalam kajian linguistik berfokus pada semantik dan kegiatan berpikir kritis. Sebagaimana dinyatakan Lee, Tumanova, dan Salkhanova (2016) dalam penelitiannya di Kazakhstan tentang pendekatan-pendekatan pengajaran bahasa yang baru dalam memahami aspek linguistik antroposentrik yang memberikan sudut pandang baru untuk ilmu bahasa atau linguistik. Hung (2012) menuturkan bahwa bahasa daerah juga menjadi salah satu media untuk pembelajaran di Vietnam. Penggunaan bahasa ibu pada pembelajaran bahasa Inggris di Vietnam memberikan dampak positif bagi strategi pembelajaran dalam mendefinisikan makna secara efektif dan efisien. Paradigma bahasa dan berbahasa juga merupakan simbol nasional dari suatu negara, seperti Malaysia. Seperti yang dikemukakan oleh Ying, Heng, dan Abdullah (2015), bahasa Malaysia adalah bahasa nasional di Malaysia yang menumbuhkan rasa kesatuan nasional dan menjaga nilai-nilai budaya serta identitas masyarakat.

Beberapa tulisan yang bersifat penelitian yang kemudian dibukukan telah banyak dilakukan, terutama untuk menentukan kekerabatan bahasa Melayu, antara lain, Adelaar (1985) yang meneliti bahasa-bahasa Melayu dalam berbagai dialek untuk menentukan induk bahasanya atau proto bahasa Melayu. Penelitian lain dilakukan Nothofer (1981) dalam bukunya berjudul *Proto Malayo-Javanic*.

### 2. Linguistik Historis Bahasa-Bahasa Nusantara

Blust (1991: 25) mengatakan dalam linguistik historis bahwa sebuah bahasa purba adalah sebuah bahasa leluhur hipotesis dari sekelompok bahasa terbukti yang dapat disimpulkan atau direkonstruksikan atas dasar keserupaan sistem di antara bahasa terbukti keturunannya atau bahasa kerabatnya. Oleh karena itu, rekonstruksi atas sebuah bahasa purba memerlukan seperangkat bahasa terbukti yang jelas batas-batasnya yang mewakili berbagai bahasa turunan yang telah menyimpang dari bahasa leluhur mereka.

Dengan melihat persebaran bahasa-bahasa Melayu yang sampai jauh di bagian timur kepulauan Nusantara, bahasa Melayu merupakan salah satu anggota keluarga bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia merupakan kumpulan bahasa yang



mempunyai hubungan genetik yang luas wilayahnya yang tersebar dari kepulauan Madagaskar di sebelah barat, Pulau Paskah di sebelah timur, dan Selandia Baru di sebelah selatan. Hal itu berkaitan dengan batas wilayah yang dimiliki bahasa-bahasa Nusantara.

Keturunan bahasa Melayu purba--termasuk di dalamnya adalah bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia yang mulanya berasal dari bahasa Melayu--digunakan sebagai lingua franca di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara sebelum kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-16. Oleh karena itu, akan diperoleh dialek-dialek bahasa Melayu, seperti Melayu Banjar, Melayu Serawak, Melayu Brunei, Melayu Kupang, Melayu Manado, dan Melayu Ambon.

Kridalaksana (1991: 2) menyatakan bahwa dari sudut intern linguistik, bahasa Indonesia merupakan salah satu varian historis, varian sosial, dan varian regional dari bahasa Melayu. Dikatakan varian historis karena bahasa Indonesia merupakan kelanjutan dari bahasa Melayu, bukan dari bahasa lain di Asia Tenggara ini. Dikatakan varian sosial karena bahasa Indonesia dipergunakan oleh sekelompok masyarakat yang menamakan diri bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan bangsa Malaysia atau bangsa Brunei yang menggunakan varian bahasa Melayu lain. Dikatakan varian regional karena bahasa Indonesia digunakan di wilayah yang sekarang disebut Republik Indonesia.

Penelitian bahasa pada suatu masa tidak muncul secara tiba-tiba atau tercipta dari kekosongan, tetapi merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan. Hal itu terutama berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada suatu masa adalah memperluas, menambah, atau dapat juga mengurangi apa yang sudah dilakukan orang lain. Demikian pula dengan penelitian ini sebagai salah satu upaya untuk melihat hubungan yang tampak di antara bahasa-bahasa Nusantara dengan bahasa Indonesia.

Untuk membandingkan bahasa-bahasa berkerabat, diperlukan pemahaman terhadap bahasa-bahasa tersebut dalam status hubungannya sehingga kemungkinan ditemukan persamaan-persamaan yang menandai hubungan itu dalam berbagai bentuk sebagai perubahan yang terjadi. Dalam perbandingan bahasa, diperlukan dialektologi sebagai bagian yang mempelajari perbedaan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam suatu bahasa, terutama dari segi geografisnya. Sementara itu, sosiolinguistik melihat perbedaan unsur-unsur kebahasaan dari segi sosial kemasyarakatannya. Dari kedua bidang tersebut dapat dipahami mengapa bahasa-bahasa yang sebenarnya berada terpisah jauh masih memiliki persamaan-persamaan sekaligus perbedaan sebagai perubahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Bagaimana migrasi bahasa terjadi melalui suatu komunitas masyarakat tertentu sehingga memunculkan varian-varian sebagaimana yang terjadi pada bahasa-bahasa Nusantara.

Sebagaimana dinyatakan Mahsun (1995: 21), perbedaan unsur-unsur kebahasaan dalam suatu bahasa memunculkan perbedaan yang bersifat dialektal dan subdialektal yang tidak terjadi secara serentak dalam suatu waktu, tetapi dalam fase perkembangan yang cukup panjang yang dialami oleh penutur bahasa itu sendiri. Oleh karena itu, pembentukan dialek/subdialek dalam suatu bahasa berkaitan pula dengan sejarah yang dialami oleh penutur bahasa itu sendiri.

Di sisi lain, Blust (1991: 31) menyatakan bahwa suatu bahasa yang merupakan bahasa leluhur bahasa-bahasa, antara lain, Melayu-Indonesia standar,





Minangkabau, Iban, Selako, Banjar, Melayu Jakarta, Melayu Ambon dituturkan di wilayah Kalimantan Barat Daya, dan Sumatra Tengah Timur. Kita dapat menduga dengan keyakinan bahwa masyarakat ini berada di zona pemisah Kalimantan-Sumatra (yang menghadap ke daerah pantai kedua pulau itu) pada sekitar mulainya era Kristen atau mungkin pada satu dua abad sebelumnya. Penutur bahasa Melayu/rumpun Melayu Purba diperkirakan memiliki suatu orientasi kelautan yang kuat. Meskipun tinggal di Pulau Bangka, Belitung, Anambas, Natuna, dan mungkin pulau-pulau kecil lainnya yang bertebaran di laut Cina Selatan, mereka masih membentuk masyarakat bahasa yang boleh dikatakan homogen. Pada saat yang sama, pengamatan atas kosakata budaya menunjukkan bahwa rakyat mempraktikkan hortikultura ladang serta menanam padi gaga, padi-padian, dan umbi-umbian. Pada masa yang agak kemudian, kira-kira 1.000 M, para penutur bahasa Melayu dari Riau-Johor atau beberapa daerah sekitar Sumatra atau Malaya tersebar di wilayah Jakarta, Ambon di Maluku, dan mungkin juga di beberapa bagian Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur lainnya.

Penelitian lain yang dilakukan Collins (1986) terkait sejarah migrasi masyarakat bahasa rumpun Melayu di Indonesia Barat menyatakan bahwa bahasa Melayu Serawak dan Brunei secara leksikal sama dekat dengan bahasa Melayu standar seperti bahasa Melayu Jakarta dan Melayu Ambon sehingga kemungkinan dialek-dialek ini berhubungan dengan permukiman Kalimantan Barat Laut oleh penutur yang sangat mungkin berasal dari Riau-Johor. Oleh karena itu, dalam lingkup kecil penelitian ini mencoba mencari hubungan kekerabatan tersebut dari korespondensi bunyi di antara bahasa-bahasa Nusantara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang diterapkan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode korespondensi fonemis. Korespondensi fonemis merupakan metode untuk menemukan hubungan antarbahasa dalam bidang bunyi bahasa. Teknik penetapan korespondensi bunyi antarbahasa selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan hipotesis mengenai bunyi-bunyi proto dalam bahasa tua yang menurunkan bahasa-bahasa kerabat dari tingkat perkembangan sebelumnya (Keraf, 1984: 40).

Bahasa kerabat adalah bahasa yang memiliki kesamaan dan kemiripan bentuk dan makna sebagai akibat dari perkembangan sejarah yang sama atau perkembangan dari suatu bahasa proto yang sama. Bahasa yang mempunyai hubungan sejarah yang sama atau berasal dari bahasa proto yang sama dimasukkan ke dalam satu keluarga bahasa (*language family*).

Korespondensi fonemis, selain digunakan untuk menentukan perubahan-perubahan fonemis yang teratur pada bahasa-bahasa kerabat yang diperbandingkan, digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan antarbahasa yang diperbandingkan. Keteraturan fonemis tersebut oleh Grimm disebut dengan istilah *Hukum Bunyi*, yang selanjutnya lebih dikenal dengan *korespondensi bunyi* (*Phonemic Correspondence*) (Keraf, 1984: 40).

Metode analisis korespondensi fonemis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu (1) mendaftar glos yang diduga memiliki nilai korespondensi; (2) membandingkan fonem demi fonem dari tiap segmen yang terdapat pada posisi yang sama, dimasukkan dalam satu perangkat korespondensi; (3) memperoleh perangkat korespondensi; dan (4) menentukan perubahan-perubahan bunyi yang terjadi dalam sejumlah glos yang diperbandingkan.



Data diperoleh dengan metode simak, sebagaimana dinyatakan Mahsun (2005: 26) bahwa istilah menyimak di sini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis. Untuk metode dan teknik analisis data diacu pendapat Mahsun (2005: 143--144), yaitu penentuan unsur-unsur bahasa yang berbeda yang menggunakan metode padan intralingual (PI) dengan teknik dasar hubung banding intralingual (THBI) dan teknik lanjutan hubung banding (HB) membedakan (HBB). Selain itu, juga digunakan metode komparatif eksploratif. Realisasinya dilakukan melalui cara pengidentifikasian bentuk-bentuk yang menjadi realisasi dari suatu makna tertentu pada setiap bahasa yang dibandingkan sehingga diketahui bentuk korespondensi dan variasi yang ada.

Penyajian terhadap hasil-hasil penelitian ini dilakukan secara formal dan informal. Artinya, hasil penelitian berupa kaidah-kaidah disajikan secara formal dan informal. Dengan metode formal, hasil penelitian disajikan dalam bentuk lambang-lambang atau tanda dengan maksud agar lebih ringkas dan padat, sekali pandang kaidah yang disajikan dapat ditangkap secara utuh. Lambang-lambang linguistik yang digunakan, di antaranya, adalah tanda kurang (-), tanda kurung siku ([...]), tanda kurung miring (/.../), tanda sendi turun (#), dan tanda tilde (~). Lambang-lambang konvensional tersebut digunakan terutama untuk merumuskan pola-pola kaidah perubahan bunyi bahasa. Tidak semua hasil penelitian dan kaidah dapat dilambangkan. Oleh karena itu, hasil penelitian yang tidak dapat disajikan dengan lambang atau tanda dirumuskan dengan pengungkapan atau pendeskripsian menggunakan kata-kata biasa. Cara penyajian seperti ini menganut metode informal (Sudaryanto, 1993: 144--157).

## **PEMBAHASAN**

Dari data terbatas pada kosakata dasar dan aktivitas, situasi kebahasaan di Nusantara masih menunjukkan bukti-bukti kekerabatan yang sangat erat. Adanya korespondensi bunyi pada kata-katanya telah mengarah pada induk bahasa yang sama meskipun terjadi inovasi, baik secara internal maupun eksternal suatu bahasa. Hal itu sesuai dengan wilayah pakai bahasa, kontak bahasa secara geografis, kontak bahasa karena migrasi dan transmigrasi sehingga terjadi pinjam-meminjam kata-kata tertentu untuk kebutuhan tertentu. Korespondensi bunyi terjadi pada sejumlah kata yang merupakan contoh data yang diambil dari medan makna yang meliputi kata bilangan, anggota tubuh, tentang alam, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, di samping kata-kata yang menunjukkan aktivitas serta kata sifat. Hal itu dipertimbangkan sebagai kata-kata yang pasti dimiliki oleh semua bahasa dan sulit berubah dalam waktu yang cukup lama. Data korespondensi dan variasi bunyi bahasa-bahasa Nusantara disajikan pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.



**Tabel 1**  
**Korespondensi Bahasa Nusantara Aspek Kata Bilangan**

No.	Bahasa Indonesia	Bahasa Nias	Bahasa Aceh	Bahasa Minang	Bahasa Batak	Bahasa Jawa	Bahasa Banjar	Bahasa Toraja	Bahasa Ambon	Bahasa Papua
1.	Satu	Sara	Sa	Ciek	Sada	Siji	Asa	Misa	Sasa	Seta
2.	Dua	Dua	Duwa	Duo	Dua	Loro	Dua	Da' dua	Ru	Dewa
3.	Tiga	Tolu	Lhee	Tigo	Tolu	Telu	Tiga	Tallu	Tel	Tegi
4.	Empat	Ofa	Peuet	Ampek	Apat	Papat	Ampat	A' pa	Faak	Papa
5.	Lima	Lima	Limong	Limo	Lima	Limo	Lima	Lima	Lim	Lama
6.	Enam	Ono	Nam	Anam	Anom	Enem	Anam	Annam	Nean	Ene
7.	Tujuh	Fitu	Tujoh	Tujuah	Pitu	Pitu	Pitu	Pitu	Fit	Teju
8.	Delapan	Walu	Lapan	Salapan	Wolu	Wolu	Walu	Karua	Wau	Salepa
9.	Sembilan	Siwa	Sikureueng	Sambilan	Sia	Sanga	Sanga	Kasera	Siu	Sabila
10.	Sepuluh	Fulu	Siploh	Sapuluah	Sampuluh	Sepuluh	Sapuluh	Sangpulo	Tru	Sapuluh
11.	Dua belas	Felendrua	Duwablah	Duo baleh	Sampulu dua	Rolas	Duawalas	Sangpulo dua	Vut ainru	Dewa bela



**Tabel 2**  
**Korespondensi Bahasa Nusantara Aspek Anggota Tubuh**

<b>No.</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>	<b>Bahasa Nias</b>	<b>Bahasa Aceh</b>	<b>Bahasa Juemala</b>	<b>Bahasa Kapalo</b>	<b>Bahasa Olu</b>	<b>Bahasa Angir</b>	<b>Bahasa Iduang</b>	<b>Bahasa Bibia</b>	<b>Bahasa Bulu</b>	<b>Bahasa Batih</b>	<b>Gigi</b>	<b>Bahasa Ngingi</b>	<b>Bahasa Mustoko</b>	<b>Bahasa Kapala</b>	<b>Bahasa Ulu</b>	<b>Bahasa Inge</b>	<b>Bahasa Iwe</b>	<b>Bahasa Hulu</b>	<b>Bahasa Illang</b>	<b>Bahasa Hungo</b>	<b>Bahasa Poyo</b>	<b>Bahasa Ulu</b>	<b>Bahasa Toraja</b>	<b>Bahasa Bugis</b>	<b>Bahasa Ulu</b>	<b>Bahasa Ambon</b>	<b>Bahasa Poyu</b>	<b>Bahasa Kapala</b>	<b>Bahasa Hop</b>	<b>Bahasa Bale</b>	
1.	Kepala	Hogo	Juemala	Kapalo	Olu	Mustoko	Kapala	Irung	Lambe	Wulu	Bitis	Gigi	Isi	Ulu	Kapala	Ulu	Inge	Iwe	Hulu	Illang	Hungo	Poyo	Ulu	Bugis	Ulu	Ambon	Poyo	Kapala	Hop	Bale		
2.	Hidung	Nikhu	Idong	Iduang	Angir	Irung	Hidung																									
3.	Bibir	Bewe	Bibi	Bibia	Baba	Lambe	Bibir																									
4.	Bulu	Bulu	Bulee	Bulu	Imbulu	Wulu	Bulu																									
5.	Betis	Borojisi	Beuteh	Batih	Bitis																											
6.	Gigi	Ijo	Gigoe	Gigi	Ngingi	Gigi	Gigi																									

**Tabel 3**  
**Korespondensi Bahasa Nusantara Aspek Alam**

<b>No.</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>	<b>Bahasa Nias</b>	<b>Bahasa Aceh</b>	<b>Bahasa Matauroe</b>	<b>Bahasa Matoari</b>	<b>Bahasa Matantari</b>	<b>Bahasa Alo</b>	<b>Bahasa Bupa</b>	<b>Bahasa Rata</b>	<b>Bahasa Lintang</b>	<b>Bahasa Banyu</b>	<b>Bahasa Pari</b>	<b>Bahasa Kembang</b>	<b>Bahasa Bungo</b>	<b>Bahasa Karambia</b>	<b>Bahasa Harambir</b>	<b>Bahasa Kambil</b>	<b>Bahasa Humba</b>	<b>Bahasa Kaluku</b>	<b>Bahasa Unga</b>	<b>Bahasa Pare</b>	<b>Bahasa Hanasik</b>	<b>Bahasa Pade</b>	<b>Bahasa Wabur</b>
1.	Matahari	Sino	Matauroe	Matoari	Matantari	Stengen	Uroi	Tampur	Ijo	Bintong	Banyu	Baru	Kembang	Unga	Kambil	Humba	Kaluku	Bunga	Kaluku	Bunga	Pare	Hanasik	Pade	Matahar
2.	Angin	Angi	Angeen	Angin	Alo	Angin	Tampur	Maritam	Maido	Bintong	Banyu	Baruh	Kembang	Unga	Kambil	Humba	Kaluku	Bunga	Kaluku	Bunga	Pare	Hanasik	Pade	Wabur
3.	Buah	Bua	Boh	Buah	Bupa	Woh	Maritam	Buah	Maido	Bintong	Banyu	Baruh	Kembang	Unga	Kambil	Humba	Kaluku	Bunga	Kaluku	Bunga	Pare	Hanasik	Pade	Wabur
4.	Hijau	Owunge'e	Hijo	Ajau	Rata	Ijo	Ijo	Maido	Maido	Bintong	Banyu	Baruh	Kembang	Unga	Kambil	Humba	Kaluku	Bunga	Kaluku	Bunga	Pare	Hanasik	Pade	Wabur
5.	Bintang	Ndoroji	Bintang	Bintang	Bintang	Lintang	Bintang	Bintong	Bintong	Bintong	Banyu	Baruh	Kembang	Unga	Kambil	Humba	Kaluku	Bunga	Kaluku	Bunga	Pare	Hanasik	Pade	Wabur
6.	Air	Idono	Le	Aia	Aek	Banyu	Banyu	Banyu	Banyu	Bintong	Banyu	Baruh	Kembang	Unga	Kambil	Humba	Kaluku	Bunga	Kaluku	Bunga	Pare	Hanasik	Pade	Wabur
7.	Laut	Asi	Laot	Launik	Laut	Tasi	Tasi	Tasi	Tasi	Bintong	Banyu	Baruh	Kembang	Unga	Kambil	Humba	Kaluku	Bunga	Kaluku	Bunga	Pare	Hanasik	Pade	Wabur
8.	Padi	Fakhe	Pade	Padi	Abuan	Ase	Ase	Ase	Ase	Bintong	Banyu	Baruh	Kembang	Unga	Kambil	Humba	Kaluku	Bunga	Kaluku	Bunga	Pare	Hanasik	Pade	Wabur
9.	Bunga	Buna	Bungong	Bungo	Bunga	Kembang	Kembang	Kembang	Kembang	Bintong	Banyu	Baruh	Kembang	Unga	Kambil	Humba	Kaluku	Bunga	Kaluku	Bunga	Pare	Hanasik	Pade	Wabur
10.	Kelapa	Sekhula	Klambe	Karambia	Harambir	Humbal	Humbal	Humbal	Humbal	Bintong	Banyu	Baruh	Kembang	Unga	Kambil	Humba	Kaluku	Bunga	Kaluku	Bunga	Pare	Hanasik	Pade	Wabur

11.	Tembakau	Baku	Bakong	Tembakau	Bato	Mbako	Timbakau	Tembaka u	Sembako	Bakau	Kambek o
12.	Ketumbar	Ketumbar	Katumba	Hatumbar	Tumbar	Ringin	Katumbar	Ketumbar	Ketumbar	Ketumb ar	Kertemb ar
13.	Beringin	Beuringin	Baringin	Jabi-jabi	Ringin	Baringin	Baringin	Beringin	Beringin	Beringin	Biringe

Tabel 4

**Korespondensi Bahasa Nusantara Aspek Binatang**

No.	Bahasa Indonesia	Bahasa Nias	Bahasa Aceh	Bahasa Keubeue	Bahasa Kabau	Bahasa Jawi	Bahasa Anjiang	Bahasa Odang	Bahasa Udeueng	Bahasa Lembu	Bahasa Harba	Bahasa Kebo	Bahasa Sapi	Bahasa Asu	Bahasa Urang	Bahasa Hundang	Bahasa Kuyuk	Bahasa Sapi	Bahasa Asu	Bahasa Urang	Bahasa Sapi	Bahasa Asu	Bahasa Udadang	Bahasa Sapi	Bahasa Enyo	Bahasa Anjongjeng
1.	Kerbau	Gorobao	Keubeue	Keubeue	Kabau	Jawi	Anjiang	Odang	Udeueng	Lembu	Harba	Kebo	Sapi	Asu	Urang	Hundang	Kuyuk	Sapi	Asu	Urang	Sapi	Asu	Udadang	Sapi	Enyo	Anjongjeng
2.	Sapi	Sawi	Leumo	Leumo	Jawi	Jawi	Anjiang	Odang	Udeueng	Lembu	Harba	Kebo	Sapi	Asu	Urang	Hundang	Kuyuk	Sapi	Asu	Urang	Sapi	Asu	Udadang	Sapi	Enyo	Anjongjeng
3.	Anjing	Asu	Asee	Asee	Anjiang	Anjiang	Anjiang	Odang	Udeueng	Lembu	Harba	Kebo	Sapi	Asu	Urang	Hundang	Kuyuk	Sapi	Asu	Urang	Sapi	Asu	Udadang	Sapi	Enyo	Anjongjeng
4.	Udang	Uro	Udeueng	Udeueng	Anjiang	Anjiang	Anjiang	Odang	Udeueng	Lembu	Harba	Kebo	Sapi	Asu	Urang	Hundang	Kuyuk	Sapi	Asu	Urang	Sapi	Asu	Udadang	Sapi	Enyo	Anjongjeng



Data yang tertera dalam tabel menunjukkan adanya korespondensi bunyi dan variasi bunyi pada kaya bilangan, misalnya, *sa* (Aceh), *sara* (Nias), *sada* (Batak), *asa* (Banjar), *seddi* (Bugis), *psa* (Ambon), *seta* (Papua), di sisi lain ada *siji* (Jawa), *ciek* (Minangkabau), yang apabila ditelusuri lebih lanjut tentu akan ditemukan asal kata yang dari induk bahasa yang sama sehingga yang lain merupakan variasi bunyi sebagai perubahan internal dari bahasa yang bersangkutan. Demikian pula untuk kata bilangan yang lain, misalnya, makna ‘dua’, akan direalisasikan menjadi *dua* (Nias), *duwa* (Aceh), *duo* (Minangkabau), *dua* (Batak), *dua* (Banjar), *duwa* (Bugis), *dadua* (Toraja), *dewa* (Papua), di sisi lain ada loro yang sesungguhnya dapat ditelusuri dari kata yang seasal secara diakronis sehingga bentuk plu (Ambon) kemungkinan merupakan bentuk variasinya. Kata-kata bilangan selanjutnya, seperti tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, penyebutan dua puluh ke atas, sampai dengan seratus menunjukkan adanya korespondensi bunyi. Kata-kata tersebut menjadi indikator hubungan di antara bahasa-bahasa Nusantara.

Korespondensi dan variasi bunyi selanjutnya diambil dari anggota tubuh manusia karena kata-kata itu tentu dimiliki oleh semua bahasa. Misalnya, untuk makna ‘kepala’ akan ditemukan bentuk *jeumala* (Aceh), *kapalo* (Minangkabau), *olu* (Batak), *kapala* (Banjar, Papua), *ulu* (Bugis, Toraja), sedangkan yang berbeda adalah *sirah* (Jawa), *poyo* (Ambon), dan *hogo* (Nias) dan kata-kata itu juga menjadi indikator hubungan kekerabatan di antara mereka. Kata lain, misalnya, untuk makna ‘hidung’ yang direalisasikan menjadi *idong* (Aceh), *iduang* (Minangkabau), *hidung* (Banjar), *irung* (Jawa), yang dapat dilihat dari bentuk yang hampir sama. Sementara itu, bentuk lain yang agak berbeda adalah *inge* (Bugis), *ilang* (Toraja), *angir* (Batak), *hungo* (Ambon), *hop* (Papua), dan *nikhu* (Nias).

Untuk makna ‘bibir’ direalisasikan menjadi *bibir* (Banjar, Toraja), *bibi* (Aceh), *bibia* (Minangkabau), *baba* (Batak), *bewe* (Nias), *lambe* (Jawa), *iwe* (Bugis). Dari bentuk-bentuk tersebut sebenarnya dapat dirunut bentuk asalnya dari bahasa induk yang sama meskipun bentuk yang ditemukan di Papua adalah *bale* yang masih mempunyai kemiripan. Sama seperti yang terdapat pada makna ‘bulu’, kata bulu direalisasikan menjadi *bulu* (Minangkabau, Banjar, Nias), *hulu* (Bugis), *wulu* (Jawa), *imbulu* (Batak), serta bentuk variasi, seperti *bumbe* (Papua), *tangdia* (Toraja), dan *hatulo* (Ambon) dari bentuk-bentuk kata yang menjadi anggota tubuh yang menunjukkan adanya kekerabatan.

Hal lain untuk mendukung kekerabatan adalah kata-kata yang menyatakan alam, misalnya, untuk makna ‘matahari’ direalisasikan menjadi *mataaurue* (Aceh), *matoari* (Minangkabau), *matantari* (Batak), *uroi* (Banjar), *mateso* (Bugis), *srengenge* (Jawa), *matahari* (Toraja, Ambon), sedangkan yang berbeda adalah bentuk *sino* (Nias) dan *wabur* (Papua) yang merupakan variasi dari bentuk di tempat lain. Bentuk lain yang berhubungan dengan alam, misalnya, untuk makna ‘air’ ditemukan bentuk *aia* (Minangkabau), *ae* (Batak), *uai* (Toraja), *ai* (Papua), *uwae* (Bugis), *banyu* (Jawa, Banjar), sedangkan bentuk yang berbeda adalah *ie* (Aceh), *idane* (Nias), dan *woya* (Ambon) bentuk ini seperti kata *toya* yang berarti ‘air’ dalam bahasa Jawa kromo.

Kata-kata yang menunjukkan kekerabatan lainnya adalah yang menyatakan tumbuh-tumbuhan, misalnya, kata *padi* yang direalisasikan menjadi *padi* (Minangkabau), *pade* (Aceh, Papua), *pari* (Jawa), *pare* (Toraja), *fakhe* (Nias), *ase* (Bugis), sedangkan bentuk yang berbeda adalah *baruh* (Banjar), *hanasik* (Ambon),



*abuan* (Batak) yang juga menjadi penanda hubungan kekerabatan. Kata lain, misalnya, untuk makna ‘Bunga’, bentuk yang ditemukan adalah *bunga* (Toraja, Batak, dan Ambon), *bungong* (Aceh), *bungo* (Minangkabau), *unga* (Bugis), *buna* (Nias), *bunge* (Papua), sedangkan bentuk *kambang* (Banjar) dan *kembang* (Jawa). Meskipun lokasinya agak jauh, sering ditemukan bentuk yang hampir sama sehingga ada kemungkinan berasal dari bahasa yang sama atau saling meminjam.

Bagian tumbuh-tumbuhan yang dimiliki hampir di wilayah pakai bahasa Nusantara adalah *kelapa*, untuk makna ‘pohon’ yang dimaksud, antara lain, ditemukan dalam bentuk *kelapa* atau *klapa* untuk daerah Jawa dan Ambon, sedangkan di Jawa digunakan bentuk yang lain, seperti *kerambil* atau *krambil* dan *kambil*. Bentuk-bentuk lain adalah *karambia* (Minangkabau), *harambir* (Batak), *klambe* (Aceh), *kaluku* (Bugis dan Toraja), *kakana* (Papua), sedangkan yang agak berbeda adalah *sekhula* yang digunakan di Nias untuk makna tersebut. Hal itu juga menjadi penanda hubungan kekerabatan di antara mereka. Untuk sejenis pohon yang dipunyai di wilayah ini adalah *beringin* yang untuk makna tersebut di beberapa wilayah digunakan bentuk yang sama, yaitu *beringin* (Toraja, Bugis, dan, Ambon), sedangkan *baringin* digunakan di Minangkabau dan Banjar; *weringin* atau *ringin* digunakan di Jawa. Di Aceh digunakan *beuringen*, Papua menggunakan *biringin*, di Batak digunakan *jadi-jabi* untuk makna ‘pohon’ tersebut, sedangkan di Nias tidak ada pohon itu.

Kata-kata lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan kekerabatan adalah kata yang berhubungan dengan nama-nama binatang karena jenis binatang inilah yang juga dimiliki hampir di semua wilayah Nusantara. Misalnya, untuk kata yang digunakan untuk menyebut *lembu* atau *sapi*, bentuk yang ditemukan adalah *sapi* (Banjar, Jawa, Toraja, dan Ambon), *sawi* (Nias), *saping* (Bugis), dan *sapo* (Papua). Yang agak berbeda adalah Aceh yang menggunakan bentuk *leumo* dan Batak *lembu*. Bentuk *lembu* juga digunakan di wilayah Jawa, terutama bahasa kromo dan daerah Minangkabau menggunakan bentuk *jawi* untuk makna tersebut.

Nama binatang lain yang hampir sama dengan sapi adalah kerbau, yang digunakan di daerah Ambon, sedangkan daerah lain mengalami perubahan sehingga ditemukan dengan bentuk yang hampir sama, yaitu *kabau* (Minangkabau), *keubeue* (Aceh), *gerebao* (Nias), *harba* (Batak), *kebo* (Jawa); bentuk yang sangat berbeda adalah *tedong* (Toraja, Bugis), *keskado* (Papua), dan *hadangan* (Banjar). Bentuk-bentuk yang demikian dapat terjadi karena inovasi internal atau pinjaman dari bahasa lain akibat adanya kontak bahasa yang wilayah pakainya berdekatan.

Untuk nama binatang yang juga dimiliki hampir semua wilayah adalah *anjing*. Untuk makna ini ditemukan kata *asu* yang digunakan di daerah Nias, Jawa, Bugis, Toraja; *asee* digunakan di Aceh. Daerah yang menggunakan bentuk yang berbeda, antara lain, adalah *anjiang* (Minangkabau), *biang* (Batak), *kuyuk* (Banjar), *enyo* (Ambon), dan *anjonjeng* (Papua). Dari daerah-daerah itu yang sangat berbeda adalah daerah Banjar yang menggunakan *kuyuk*.

Nama binatang yang lain adalah *udang* yang di setiap daerah mempunyai, bahkan menggunakan bentuk yang sama, yaitu *udang* (Batak, Toraja, Ambon, dan Papua), sedangkan Aceh menggunakan bentuk *udeueng*, Minangkabau *odang*, Jawa dan Bugis menggunakan *urang*, Nias *uro*, dan Banjar menggunakan bentuk *hudang*.



Selain kata-kata yang menjadi nama binatang, kata yang selalu dimiliki oleh suatu bahasa adalah yang menyatakan peralatan rumah tangga, kata-kata yang demikian berhubungan dengan kehidupan semua orang. Untuk kata tersebut, misalnya, untuk menyebut 'rumah', yang digunakan adalah *rumoh* (Aceh), *rumah* (Minangkabau), *omo* (Nias), *sapo* (Batak), *omah* (Jawa), *rumahan* (Banjar), *bolae* (Bugis), *banua* (Toraja), *um* (Ambon), dan *Rume* (Papua). Beberapa kata dari data tersebut mempunyai kemiripan yang dapat ditelusuri sebagai tanda hubungan kekerabatan di antara mereka. Contoh kata yang lain adalah *atap* sebagai bagian dari rumah. Kata yang digunakan adalah *bubong* (Aceh), *atok* (Minangkabau), *tarup* (Batak), *lawa-lawa* (Nias), *hatap* (Banjar), *bakaweng* (Bugis), *papa* (Toraja), *yotas* (Ambon), dan *ata* (Papua). Untuk kata *atap*, kata itu mempunyai beberapa variasi yang tentu merupakan variasi internal dari bahasa yang bersangkutan atau eksternal yang merupakan pinjaman karena kebutuhan. Yang masih agak dekat adalah kata yang digunakan untuk merealisasikan makna 'genting', antara lain, *geunteng* (Aceh), *gentiang* (Minangkabau), *goting* (Batak), *gendheng* (Jawa), *genting* (Banjar), *atose* (Nias), dan *ata* (Papua). Untuk makna 'pintu', bentuk yang ditemukan, antara lain, adalah *pintu* (Minangkabau dan Batak), *pinto* (Aceh), *ba'ba* (Toraja dan Bugis), *lawang* (Banjar dan Jawa), *boa* (Ambon), dan Papua menggunakan *pitu*. Kata-kata yang digunakan untuk menyebutkan peralatan rumah tangga juga menunjukkan adanya korespondensi yang menandai adanya kekerabatan.

Dengan menggunakan kata-kata yang sulit berubah untuk rentang tahun yang cukup lama, seperti anggota tubuh manusia, kata bilangan, kata yang berhubungan dengan alam, dunia binatang dan tumbuh-tumbuhan yang sesuai dengan daerah tropis, dapat diteliti kembali tentang perkembangan bahasa-bahasa Nusantara sebagai pendukung bahasa Indonesia yang penduduknya makin besar jumlahnya. Pemahaman terhadap bahasa-bahasa daerah membantu pembelajaran bahasa Indonesia lebih mudah dan lancar.

Hasil penelitian yang menggunakan data terbatas sebetulnya belum dapat mewakili adanya korespondensi bunyi dan variasi bunyi secara sempurna. Hal itu disebabkan status suatu bahasa harus jelas tatkala dipilih sebagai salah satu dialek bahasa yang mewakili bahasa daerah tertentu. Keberadaan suatu bahasa daerah yang mempunyai daerah pakai yang cukup luas dan jumlah penutur yang besar tentu akan memiliki dialek-dialek yang perlu dipertimbangkan, kemungkinan adanya dua bentuk atau lebih dari suatu makna bahasa. Dengan demikian, dapat terjadi suatu bentuk menjadi berkorespondensi bunyi dengan bahasa lain, sedangkan yang satunya berupa variasi.

Dalam penelitian ini belum dipertimbangkan status bahasa yang dibandingkan, tetapi setidaknya ada konfirmasi dari pemakai bahasa dialek yang dipilih dengan pernyataan bahwa kosakata tersebut ada dalam bahasa daerahnya. Ada kata-kata yang ditemukan kosong karena keraguan data, lalu menggunakan bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tuturan.

Penelitian tentang bahasa-bahasa Nusantara yang hanya sebagian ini tentu lebih bersifat sinkronis dengan fokus pada persamaan dan perbedaan dari segi fonologis, morfologis, dan leksikonnya. Dengan hasil penelitian ini dapat diperkirakan hubungan kekerabatan yang dekat sehingga dapat menjadi modal awal mempelajari bahasa daerah dan budayanya.





Secara kualitatif, hubungan kekerabatan sebetulnya sudah tampak melalui korespondensi bunyi dan variasi bunyi, tetapi belum dapat ditentukan polanya secara keseluruhan. Keuntungannya terletak pada hubungan terutama dengan perkembangan bahasa Indonesia karena korespondensi lebih jelas, misalnya, *mata – mato – mate – mata* untuk makna ‘mata’, *igung – idung – hirung – irung – idong* untuk makna ‘hidung’, sedangkan masih terdapat variasi kata dalam bahasa daerah tertentu. Korespondensi bunyi yang tampak dekat adalah antara bahasa Indonesia dan bahasa Minangkabau dan bahasa Batak dan bahasa Palembang.

Dari data yang terbatas pada penelitian bahasa-bahasa Nusantara Kelompok Sumatra ini, tampaknya korespondensi sempurna dapat terlihat apabila bahasa tersebut dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, paparan analisis akan diawali dengan korespondensi bunyi bahasa-bahasa tersebut dengan bahasa Indonesia.

### 1. Korespondensi Bahasa Minangkabau dengan Bahasa Indonesia

Beberapa korespondensi bunyi secara fonologis antara bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia, antara lain, adalah *o ~ a*, *ui ~ ut*, *uang ~ ung*, *iang ~ ing*, *eh ~ as*, seperti yang terdapat pada contoh *bawo – bawa*, *parui? – perut*, *kampuang – kampung*, *anjiang – anjing*, *paneh -- panas*. Beberapa contoh korespondensi bahasa Minangkabau dengan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

Korespondensi / o / ~ / a / = tigo ~ tiga

limo ~ lima

kudo ~ kuda

samo ~ sama

mudo ~ muda

Korespondensi / ui? / ~ / ut / : parui? ~ perut

mului? ~ mulut

lalui? ~ laut

lutui? ~ lutut

ikui? ~ ikut

Korespondensi / ua / ~ / uJ / : jantuang ~ jantung

buruang ~ burung

gunuang ~ gunung

kampuang ~ kampung

jaguang ~ jagung

hiduang ~ hidung

Korespondensi / iaJ / ~ / iJ / : kambiJang ~ kambing

kuciang ~ kucing

anjiang ~ anjing

kanciang ~ kancing

pentiang ~ penting

Korespondensi / Eh / ~ / as / : panEh ~ panas

amEh ~ emas

galEh ~ gelas

nanEh ~ nanas

lamEh ~ lemas

Korespondensi / uah / ~ / uh / : tujuah ~ tujuh

sapaluah ~ sepuluh



	sembuah ~ sembuah
	balabuah ~ berlabuh
	basuah ~ basuh
Korespondensi / i? / ~ / it / :	langi? ~ langit
	saki? ~ sakit
	kunyi? ~ kunyit
	raki? ~ rakit
	buki? ~ bukit
Korespondensi / ia / ~ / ir / :	pasia ~ pasir
	aia ~ air
	bunjia ~ banjir
Korespondensi / a / ~ / ə / :	kapala ~ kepala
	sarasi ~ serasi
	saraso ~ serasa
	balakang ~ belakang

## 2. Korespondensi Bahasa Batak dengan Bahasa Indonesia

Beberapa korespondensi bunyi secara fonologis antara bahasa Batak dan bahasa Indonesia, antara lain, Ø ~ k, h ~ h, o ~ a, o ~ ə, seperti pada kata *ari ~ hari*, *basu ~ basuh*, *ahu ~ aku*, *hita ~ kita*, *dapot ~ dapat*, *ingot ~ ingat*, *opat ~ empat*, *porang ~ perang*. Beberapa contoh korespondensi bahasa Batak dan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

Korespondensi / Ø / ~ / h / :	taon ~ tahun
	ari ~ hari
	basu ~ basuh
	hasi ~ kasih
	satonga ~ setengah
Korespondensi / h / ~ / k / :	hami ~ kami
	ahu ~ aku
	hita ~ kita
	hurang ~ kurang
	ihut ~ ikut
Korespondensi / o / ~ / a / :	ulog ~ ular
	ingot ~ ingat
	onom ~ enam
	dapot ~ dapat
	tinanom ~ ditanam
Korespondensi / o / ~ / ə / :	opat ~ empat
	porang ~ perang
	jomurhon ~ jemurkan
	satonga ~ setengah
	hotbo ~ kerbau
Korespondensi / ɲ / ~ ʃ Ø /	singkola ~ sekolah
	jumpang ~ jumpa

## 3. Korespondensi Bahasa Lampung dan Bahasa Indonesia

Beberapa korespondensi bunyi secara fonologis antara bahasa Lampung dan bahasa Indonesia, antara lain, adalah a ~ ow, seperti pada kata *wow ~ dua*, *tegow ~*



tiga, kh ~ r pada kata *bekhmain* ~ *bermain*, *bhiku* ~ *biru*. Adapun contoh-contoh lain tampak pada contoh berikut.

bekhlau ~ berlayar  
mendengakh ~ mendengar  
gukhu ~ guru  
telukh ~ telur  
dukhwain ~ durian  
bekhenang ~ berenang

#### 4. Korespondensi Bahasa Palembang dengan Bahasa Indonesia

Beberapa korespondensi bunyi secara fonologis antara bahasa Palembang dan bahasa Indonesia, antara lain, adalah a ~ ə, ot ~ ut, gh ~ r, seperti terdapat pada kata *matə* ~ *mata*, *duə* ~ *dua*, *mulot* ~ *mulut*, *ketot* ~ *lutut*, *jaghi* ~ *jari*, dan *laghi* ~ *cari*. Beberapa contoh korespondensi bunyi sebagai berikut.

Korespondensi / ə / ~ / a / : kelapə ~ kelapa  
itəm ~ hitam  
limə ~ lima  
buaya ~ buaya

Korespondensi / ot / ~ / ut / : lutot ~ lutut  
mulot ~ mulut  
laot ~ laut

Korespondensi / gh / ~ / r / : mataghi ~ matahari  
jaghi ~ jari  
ulagh ~ ular  
deghian ~ durian  
beghas ~ beras

#### 5. Korespondensi Morfologis

Kata merupakan hal yang sangat penting dalam kajian linguistik karena bermula dari kata suatu bahasa yang dapat dipelajari. Kata itu sendiri merupakan bentuk bebas, tetapi dapat terikat dalam penggunaannya karena makna dan kedudukannya dalam sebuah frasa atau kalimat. Yang menarik adalah dalam bentuk kata yang telah mengalami proses morfologis (pembentukan kata) akan tampak adanya korespondensi bunyi-bunyi dalam afiksnya. Misalnya, dalam bahasa Batak, afiks *mar-* berkorespondensi dengan *ber-* dan *ma-* ~ *me-*. Seperti pada contoh *marhata* ~ *berkata*, *mardalam* ~ *berjalan*, *manangko* ~ *mencuri*, dan *mengalap* ~ *menjemput*, demikian pula korespondensi morfologis antara bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia, yaitu *ba-* ~ *ber-*, *ma-* ~ *me-*, *ta-* ~ *ter-*, seperti yang terdapat pada kata *basuo* ~ *bersua*, *malie?* ~ *melihat*, *manulis* ~ *menulis*, dan *takajui?* ~ *terkejut*.

Korespondensi morfologis bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

Korespondensi / ba / ~ / bər / : banyanyi ~ bernyanyi  
baranang ~ berenang  
balagie ~ berlayar  
banama ~ bernama  
bakarajo ~ bekerja

Korespondensi / ma / ~ / mə / : mambawa ~ membawa



- malukie? ~ melukis  
mambaca ~ membaca  
marapat ~ merapat  
mandapat ~ mendapat
- Korespondensi / ta / ~ / tər / : takanang ~ terkenang  
tabawa ~ terbawa  
tahanyak ~ terhenyak  
tagalancia ~ tergelincir  
tantara ~ tentara
- Korespondensi morfologis bahasa Batak dan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.
- Korespondensi / mar- / dan / bər / : margabus ~ bernyanyi  
marnipi ~ bermimpi  
marlange ~ berenang  
mardongan ~ berteman  
mardaba ~ berkelahi
- Korespondensi / ma- / ~ / mə- / : manahori ~ membeli  
mambagi ~ membagi  
manggarar ~ membayar  
manullang ~ memukul  
mengompa ~ mengendong
- Korespondensi / par- / ~ / pə- / : parjudi ~ penjudi  
parserahan ~ perantauan  
parhutan ~ penghuni
- Korespondensi / tar- / ~ / tər / : tardungdung ~ terjangkau  
tarhallung ~ terpikul  
tarsurat ~ tertulis  
tarpondom ~ tertidur  
tarolege ~ terpijak
- Korespondensi / hon / ~ / kan / : jomurhon ~ jemurkan  
mangulahon ~ mengerjakan  
husiphon ~ bisikan  
taridahon ~ tunjukkan  
parrohahon ~ perhatikan

Contoh-contoh tersebut merupakan bentuk kata yang secara morfologis mempunyai kesamaan dalam perkembangannya dari bahasa induk. Namun, kata-kata tersebut telah mengalami perubahan yang secara linguistik disebut korespondensi karena dapat menunjukkan keteraturan. Di antara bahasa-bahasa Nusantara kelompok Sumatra yang diteliti, korespondensi morfologis yang menonjol terlihat pada bahasa Batak, bahasa Minangkabau, dan bahasa Indonesia. Sementara itu, bahasa Lampung dan bahasa Palembang ada yang sama dengan bahasa Indonesia ada pula yang sama dengan bahasa Minangkabau, terutama kosakatanya. Korespondensi morfologis yang menunjukkan aktivitas terlihat pada afiks *mar-*, *ba-*, dan *ber-* terlihat dalam bahasa Batak, bahasa Minangkabau, dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Lampung dan bahasa Palembang, keduanya menggunakan afiks *ber-* sehingga apabila direalisasikan dalam kata akan menjadi *marende*, *banyanyi*, dan *menyanyi*. Dari contoh-contoh tersebut tampak ada variasi leksikal antara *rende* dan *nyanyi*. Korespondensi yang lain adalah *ta-*, *tar-*, dan *ter-*



dalam bahasa Minangkabau, bahasa Batak, dan bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya adalah bahasa Palembang dan bahasa Lampung.

## 6. Variasi Bunyi

Variasi bunyi merupakan perubahan bunyi yang terjadi dalam bentuk-bentuk kebahasaan yang berbeda, yang terjadi secara tidak teratur dalam bahasa yang sama atau bahasa yang berbeda. Adapun contoh variasi bunyi, di antara bahasa-bahasa kelompok Sumatra, adalah sebagai berikut.

tiga – tegow – tolu – tigə – tigo ‘tiga’  
ular – olai – ulog – ulagh – ule ‘ular’  
air – ait – aek – ayik – aie ‘air’  
laut – lawok – laut – laut – laue? ‘laut’  
jari – jarei – jari – jaghi – jari ‘jari’  
pasir – aser – pasir – pasir – pasia ‘pasir’

Variasi bunyi tersebut, misalnya, untuk kata ‘tiga’ mempunyai variasi bunyi /ga/, /gəw/, /iu/, /gə/, /go/ yang dinyatakan sebagai variasi karena hal itu terjadi secara tidak teratur, dalam arti tidak berulang untuk kata-kata yang lain. Variasi yang lain, misalnya, pada kata ‘air’ ditemukan /ait/, /aek/, /ayik/, /aie/, dan /air/. Itu merupakan beberapa variasi bunyi yang ditemukan dari bahasa-bahasa Nusantara kelompok Sumatra. Bentuk variasi seperti itu terbatas pada satu atau dua contoh saja. Apabila diperhatikan dari bentuk-bentuk kebahasaannya, bahasa-bahasa yang dibandingkan lebih banyak mengandung unsur kemelayuannya; bahasa Indonesia memperlihatkan kesinambungan dengan bahasa-bahasa daerah di Nusantara.

## PENUTUP

Dari analisis data yang menggunakan kosakata dasar Swadesh dan pengembangannya melalui kata-kata yang menunjukkan aktivitas, dapat ditarik simpulan bahwa kekerabatan bahasa-bahasa Nusantara cukup kuat. Menurut para ahli yang telah melakukan penelitian sekitar abad ke-19 dan ke-20-an, bahasa-bahasa yang menjadi data pada tulisan ini termasuk kelompok Austronesia Barat (yang disebut juga sebagai bahasa-bahasa Melayu atau bahasa-bahasa Nusantara).

Implikasi praktis dari penelitian ini dapat diperhatikan besarnya kemungkinan bahwa hasil penelitian akan berpengaruh terhadap kebijakan sosial dan pendidikan tentang pemanfaatan bahasa daerah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan demikian, keberadaan bahasa daerah akan tetap terjaga seiring dengan pengembangan bahasa Indonesia.

Dari data yang terbatas ini sebenarnya cukup memberi stimulan untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui perkembangan bahasa-bahasa Nusantara ketika bahasa Indonesia telah ditentukan sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional negara Indonesia. Dengan dipilih kata-kata yang digunakan untuk menyatakan bilangan, hampir semua daerah menunjukkan bahwa adanya hubungan kekerabatan yang mengacu pada bahasa yang seinduk. Demikian pula dengan kata-kata yang digunakan untuk anggota tubuh manusia, alam, binatang dan tumbuh-tumbuhan, semua merupakan kata-kata yang sulit berubah dan akan selalu digunakan manusia dalam kehidupannya. Hal lain yang mendukung adalah dari segi morfologis juga ditemukan korespondensi, misalnya, afiks *ber-* direalisasikan menjadi *ba-* (bahasa Minangkabau, Banjar, Toraja, dan Ambon), menjadi *mar-* dalam bahasa Batak dan *ma-* dalam bahasa Aceh dan Nias.



Dari segi leksikon, fonologi, dan morfologi bahasa-bahasa Nusantara saat ini belum diteliti secara menyeluruh guna menemukan pola untuk dikaidahkan sehingga dapat dimanfaatkan pembelajaran bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia. Indonesia yang sebagian besar bahasanya termasuk bahasa-bahasa Nusantara, yang menjadi anggota Austronesia Barat, perlu dikaji ulang dengan memanfaatkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Badan Bahasa. Hal itu didasarkan pada kata-kata di Indonesia bagian timur, seperti Ambon dan Papua yang masih memiliki ciri-ciri hampir sama dengan kata-kata di Indonesia bagian barat (Melayu) meskipun pada bahasa tertentu, yang barangkali dahulu termasuk daerah perdagangan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai *lingua franca*.

Penelitian yang mendalam tentang situasi kebahasaan di Indonesia dapat diperluas dengan penelitian bahasa dari beberapa negara tetangga, terutama Malaysia, Brunei Darusalam, Singapura yang sampai sekarang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Sementara itu, bahasa Tagalog di Filipina juga berkerabat dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Korespondensi dan variasi bunyi dapat dimanfaatkan pada penelitian bahasa mendatang terhadap bahasa-bahasa di beberapa negara ASEAN menuju kebersamaan penggunaan bahasa dalam MEA.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adelaar, K.A. (1985). *Proto-Malayie, the Reconstruction of Its Phonology and Part of Its Lexicon and Morphology*. Alblaserdam: Offset-drukjerij Kanters BBV.
- Ardana, I.K. (2011). Korespondensi Fonem Proto-Austronesia dalam Bahasa Kaili dan Bahasa Uma di Sulawesi Tengah. *Tesis*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Blust, R. (1991). *Linguistik Historis Bahasa Melayu sebuah Laporan Kemajuan dalam Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, Harimurti Kridalaksana (ed). Yogyakarta: Kanisius.
- Collins, J.T. (1986). *Antologi Kajian Dialek Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Dressler, R. (2014). Exploring Linguistic Identity in Young Multilingual Learners. *TESL Canada Journal*, 23(1), 42--52. doi: <https://doi.org/10.18806/tesl.v32i1.1198>
- Hung, N.V. (2012). Mother Tongue Use in Task-Based Language Teaching Model. *English Language Teaching Journal*, 5(8), 23--30. doi: <http://dx.doi.org/10.5539/elt.v5n8p23>
- Keraf, G. (1984). *Linguistik Bandingan Historis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kridalaksana, H. (1991). *Pengantar tentang Pendekatan Historis dalam Kajian Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia dalam Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, Harimurti Kridalaksana (ed). Yogyakarta: Kanisius.
- Lee, V.S., Tumanova, A.B., dan Salkhanova, Z.H. (2016). New Approaches to a Subject of Antropocentric Linguistics. *International Journal of Environmental & Science Education*, 11(11), 4716--4728. Retrieved from <http://www.ijese.net/makale/656>
- Mahsun. (1995). *Dialektologi Diakronis sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



- Mahsun. (2005). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husain, M. (2014). Korespondensi Bunyi Bahasa Bugis Dialek Soppeng dan Dialek Ennak (Buginese Phonemic Correspondence of Soppeng and Ennak dialects). *Sawerigading*, 20(3), 353--362. Doi: <http://dx.doi.org/10.26499/sawer.v20i3.33>
- Nothofer, B. (1981). *Dialektlas von Zentral Java*. Weisbaden: Otto Harrassowitz.
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Tiani, R. (2010). Korespondensi Fonemis Bahasa Bali dan Bahasa Sumbawa. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ying, H.S., Heng, C.S., dan Abdullah, A.N. (2015). Language Vitality of Malaysian Languages and Its Relation to Identity. *GEMA Online Journal of Language Studies*, 15(2), 119--136. Retrieved from <http://ejournal.ukm.my/gema/article/view/8025>



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Pembicara Sidang Panel Sesi 2 Ruang 4**

Pembicara : Dr. Yulia Esti Katrini

Judul Makalah : “Korespondensi dan Variasi Bunyi Bahasa-Bahasa Nusantara  
Mempermudah Belajar Bahasa”

Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018

Pukul : 19.30—21.00

Moderator : Drs. S.S.T. Wisnu Sasangka, M.Pd.

Pencatat : 1. Purwaningsih

2. Ferdinandus Moses

3. Kunkun Purwati

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Sebuah bahasa purba adalah sebuah bahasa leluhur hipotesis dari sekelompok bahasa terbukti yang dapat disimpulkan atau direkonstruksikan atas dasar keserupaan sistem di antara bahasa terbukti keturunannya atau bahasa kerabatnya.
2. Kebahasaan di Nusantara masih menunjukkan bukti-bukti kekerabatan yang sangat erat. Adanya korespondensi bunyi pada kata-katanya telah mengarah pada induk bahasa yang sama meskipun terjadi inovasi baik secara internal maupun eksternal suatu bahasa. Hal ini sesuai dengan wilayah pakai bahasa, kontak bahasa secara geografis, kontak bahasa karena migrasi dan transmigrasi sehingga terjadi pinjam-meminjam kata-kata tertentu untuk kebutuhan tertentu pula.
3. Sejarah terbentuknya bahasa yang dipilih untuk berkomunikasi bersama mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa daerah dan yang menjadi bahasa ibu adalah bahasa Melayu. Kemudian dari bahasa Melayu variasi-variasi bahasa yang disesuaikan dengan kultur daerahnya.
4. Bahasa Indonesia membentuk beberapa variasi. Variasi itu terbentuk berdasarkan historis (kelanjutan dari bahasa Melayu). Varian sosial digunakan sekelompok manusia sebagai satu kesatuan budaya. Varian regional digunakan dalam skala nasional.
5. Membandingkan bahasa setiap wilayah dapat dilakukan melalui korespondensi dan variasi bunyi.
6. Untuk mengajarkan variasi bunyi bisa melalui lagu.
7. Metode yang digunakan adalah perpaduan metode komparatif, eksploratif, dan metode simak. Artinya membandingkan, bersifat fleksibel dan menyimak penggunaan bahasa lisan dan tulis.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Soviana Nur Hasanah

Instansi : Universitas Negeri Malang





**Pertanyaan:**

Kajian historis komparatif adalah sangat sulit. Bagaimana pengambilan data di lapangan? Jika korespondensi bunyi apakah pola perulangan hanya dua bahasa atau beberapa bahasa? Bagaimana mempelajari bahasa dengan menggunakan korespondensi bunyi?

**Jawaban:**

Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa. Data lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan data menyanyi bahasa-bahasa daerah yang mengandung korespondensi bunyi yang berbeda. Selain itu, jika data kurang mendukung mereka juga melakukan wawancara. Pola bahasa diawali dengan bahasa daerahnya dulu. Perulangan bahasa dilakukan perbandingan 8 bahasa. Kemudian mereka melakukan analisis secara fonologi, morfologi. Korespondensi bahasa harus didukung banyak data.

**Isu-Isu Penting:**

1. Jika kita hanya terkungkung pada satu teori, penelitian kita akan tidak berkembang. Bahasa di Nusantara dapat menjadi surga bagi para peneliti bahasa jika digali lebih mendalam, tidak menutup kemungkinan kita juga dapat menciptakan teori yang baru. Salah satunya, struktur pola kesantunan pada bahasa Bajo.
2. Melalui penelitian penelitian korespondensi dan variasi bunyi kita dapat mengembangkan penelitian kebahasaan yang lebih luas dengan membandingkan bahasa di beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina yang diduga memiliki kekerabatan dengan bahasa Melayu.



## 7. Konstruksi Peta Cerita Rakyat Madura di Pulau Madura

### KONSTRUKSI PETA CERITA RAKYAT MADURA DI PULAU MADURA

*Madurese Folktales Map Construction in Madura Island*

**Iqbal Nurul Azhar**

Universitas Trunojoyo Madura

[iqbalnurulazhar@yahoo.com](mailto:iqbalnurulazhar@yahoo.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini membahas dua hal, yaitu metamorfosis bentuk cerita rakyat Madura dan konstruksi peta cerita rakyat Madura. Sumber data penelitian ini adalah 119 cerita rakyat yang dikumpulkan dari informan-informan yang berasal dari empat kabupaten di Madura selama kurang lebih dua tahun (Maret 2016 hingga Oktober 2017). Data diperoleh dengan menggunakan metode cakap. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis data interaktif yang diusulkan oleh Miles dan Huberman. Hasil analisis data menunjukkan tiga hal: 1) terdapat tujuh fase metamorfosis bentuk cerita rakyat masyarakat Madura. Adapun fase tersebut adalah fase masa tradisi lisan, fase masa sabak, fase masa transisi lisan ke tulis, fase masa literasi, fase masa era digital tulis, fase masa digital visual, dan fase cerita rakyat internet urban (siberlore). 2) Terdapat 23 klasifikasi variasi isi cerita rakyat, yang beberapa di antaranya dapat dibagi lagi menjadi berbagai variasi yang lebih kecil. Cerita rakyat ini mengisi lima *layer* vertikal. 3) Ditemukan adanya lima elemen yang membangun cerita rakyat Madura, yaitu elemen budaya Jawa, Islam, lokal Madura, Hindu dan Cina

**Kata-kata kunci:** peta, cerita rakyat Madura, *layer*, kontur

#### **Abstract**

*This article discusses two things: the metamorphosis of Madurese folktales and the construction of Madurese folktales map. The sources of data of this article are 119 folktales, collected for approximately two years (March 2016 to October 2017) studies, from informants of four districts in Madura. The data were obtained by using interview method. They were analyzed by using Interactive Data Analysis method proposed by Miles and Huberman. The results of data analysis show three things: 1) there are seven phases of metamorphosis of Madurese folktales forms. The phases are: the the oral tradition phase, Sabak phase, the transition from oral tradition to writing phase, the literacy phase, the digital writing phase, the digital visual phase, and the Internet Folktales Urban (Cyberlore) phase, 2) there are twenty-four classifications of folktales contents, some of which can be subdivided into smaller classifications. The folktales occupy five vertical layers, 3) it also has been found five elements that construct Madurese folktales, namely Javanese element, Islam element, Madurese Local element, Hindu element and Chinese element.*

**Keywords:** map, Madurese folktales, layers, contours



## PENDAHULUAN

Cerita rakyat Madura tumbuh berkembang bersama dengan penuturnya. Dahulu kala, cerita rakyat Madura mendapat tempat terhormat di hati pemiliknya karena cerita rakyat merupakan media primer dalam mewariskan nilai-nilai luhur bangsa Madura beserta ajaran-ajaran moralnya (Azhar, 2017a). Adapun, jenis ajaran moral yang dimaksud mencakup seluruh spektrum kehidupan orang Madura. Cerita rakyat adalah cerminan kehidupan masyarakat Madura dan dipersembahkan dengan kualitas terbaik untuk menyenangkan pendengarnya.

Sayangnya, dengan makin maju dan berkembangnya zaman, generasi Madura sekarang mulai melupakan cerita rakyat mereka sendiri. Ini dapat dibuktikan dari banyaknya di antara mereka yang merasa asing dengan nama-nama tokoh legendaris seperti Pangeran Segara, Ki Poleng, Bendoro Tumenggung, Jokotole, Adipoday, Adirasa, Dewi Retnadi, Ke' Lesap. Mereka juga terkesan kurang paham asal usul nama desa mereka dan cerita-cerita lain terkait kampung halaman mereka. Padahal, pengetahuan asal usul kampung halaman penting untuk mempertahankan budaya nenek moyang. (Rachbini, D.J, dalam di van Dijk et al, 1995).

Penelitian-penelitian terdahulu tentang cerita rakyat Madura telah dilaksanakan oleh Ahmadi (2011), Bustami (2003), Soedjidjono (2002), dan Kosim (2007). Penelitian-penelitian tersebut membicarakan aspek intrinsik dan ekstrinsik, juga analisis kritiknya. Penulis sendiri telah melaksanakan penelitian cerita rakyat dengan fokus perhatian pada pencarian lanskap masyarakat Bangkalan dan Madura Barat (lihat Azhar, 2017a). Meskipun, penelitian cerita rakyat Madura telah beberapa kali dilakukan, pengamatan secara mendalam untuk menggali lebih jauh tentang metamorfosis cerita rakyat orang Madura beserta aspek-aspek yang menyertainya belum di laksanakan.

Untuk memperkenalkan kembali cerita rakyat Madura, penulis melaksanakan sebuah penelitian yang dibiayai Dirjen Dikti pada tahun 2016--2017 dengan judul *Antologi Cerita Rakyat Madura*. Penelitian ini mengumpulkan cerita rakyat asal usul desa yang ada di empat kabupaten di Pulau Madura yang tersebar di seluruh Madura. Penelitian ini menghasilkan sebuah serial buku cerita rakyat di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Penelitian ini merupakan sebagian temuan penelitian yang berhubungan dengan pemetaan cerita rakyat yang ada di Pulau Madura.

Secara umum, penelitian ini membahas dua hal: 1) metamorfosis bentuk cerita rakyat Madura dan 2) peta cerita rakyat Madura. Adanya penelitian ini diharapkan, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda masyarakat Madura, dapat kembali mengingat cerita rakyat Madura sebagai salah satu kekayaan bangsa.

## LANDASAN TEORI

Penelitian ini menerapkan pendekatan fungsionalisme. Pendekatan ini memaknai bahwa dalam legenda atau cerita rakyat, ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan atau disampaikan dalam suatu kelompok masyarakat. William R. Bascom (dalam Sims dan Stephens, 2005) berpendapat bahwa cerita rakyat merupakan sebuah cara untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan menginformasikannya ke kelompok masyarakat (hlm. 175). Menurut Bascom (2005), dalam cerita rakyat, terdapat empat fungsi integritas, yaitu fungsi pendidikan, sarana pelarian diri dari batasan-batasan budaya yang berterima, mempertahankan identitas budaya, dan validasi norma-norma budaya yang ada.



Dengan demikian, Sims dan Stephens (2005) mengatakan bahwa cerita rakyat merupakan salah satu mekanisme penting dalam mempertahankan stabilitas kebudayaan (hlm.176).

## **METODE PENELITIAN**

Sumber data penelitian ini adalah 119 cerita rakyat yang dikumpulkan dari informan yang berasal dari 4 kabupaten di Madura selama 2 tahun, yaitu dimulai dari Maret 2016 hingga Oktober 2017. Data diperoleh dengan menggunakan metode cakap (Sudaryanto,1990) dengan teknik dasar, yaitu teknik stimulasi dan teknik lanjutan, yaitu teknik rekam. Sebelum proses analisis data dilakukan, data ditabulasi. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis data interaktif yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (1994). Tahap terakhir adalah tahap penyajian hasil analisis data. Pada tahap ini, metode yang digunakan untuk menyajikan hasil analisis data adalah metode informal naratif.

## **PEMBAHASAN**

### **Metamorfosis Bentuk Cerita Rakyat Masyarakat Madura**

Fase awal lahirnya berbagai bentuk cerita rakyat Madura ada dalam ruang hidup tradisi lisan. Salah satu tradisi lisan yang kuat adalah tradisi mendongeng (Azhar, 2017b). Tradisi lisan ini berakar dari kegemaran orang Madura yang suka duduk bersama dalam *rembhâghan* (musyawarah) untuk membentuk kedekatan fisik antara para anggota keluarga, yaitu para *réng seppo* dan anggota keluarga lain yang lebih muda, para pemimpin *rembhâghan* sebagai pengarah pembicaraan sekaligus pencerita dan para pendengar, antara orang tua dan anak-anak mereka. Dalam *rembhâghan*, para *réng seppo* menceritakan kisah-kisah imajinatif dan inspiratif perjuangan dan keberanian nenek moyang dalam membangun keluarga. Cerita rakyat yang awalnya dikisahkan dalam pertemuan-pertemuan penuh kekerabatan berisi tentang silsilah keluarga, tokoh-tokoh keluarga yang pernah mengharumkan nama keluarga, asal usul desa, serta tokoh-tokoh sentral yang membuka lahan untuk dijadikan sebagai desa. Dalam kisah yang lebih epik, para *réng seppo* juga menuturkan tokoh besar Madura yang terkenal tidak hanya di Madura, tetapi juga ke daerah *manca* (luar Madura), misalnya, kisah Raden Segoro dan Bendoro Tumenggung serta asal usul kata Madura, kisah Dewi Retnadi dan Jokotole, serta kisah Pangeran Trunojoyo.

Fase kedua metamorfosis bentuk cerita rakyat Madura ada dalam masa yang dikenal sebagai masa sabak. Sabak merupakan alat tulis wajib yang dimiliki siswa sekolah di Madura pada tahun 1960-an sebagai alat bantu belajar tulis menulis (Azhar, 2017c). Karena memiliki banyak kelemahan, sabak tidak dapat menjadi tempat menyimpan ide atau gagasan permanen. Sabak sulit menjadi sarana perekam cerita rakyat sebagus buku tulis. Namun, pada masa itu sabak digunakan oleh para guru untuk mengajarkan muridnya bagaimana menuangkan ide-ide kreatif dan imajinatif yang ada di benak mereka ke dalam bentuk tulis.

Fase ketiga merupakan fase transisi antara masa lisan dan tulis. Ini terjadi setelah ditemukannya kertas dan alat cetak yang menggantikan peran sabak sebagai alat tulis. Dua teknologi ini digunakan secara luas oleh masyarakat. Sayangnya, di awal kemunculan dua teknologi ini di Madura, keduanya terbilang sebagai barang mewah. Tidak banyak orang Madura yang sanggup memanfaatkan dua sarana ini, apalagi dengan peruntukan khusus menuliskan cerita rakyat. Jikalau ada yang



menggunakan media kertas untuk menuliskan cerita rakyat dan berbagai karya sastra, dapat dipastikan, penulisnya adalah bagian pemerintah di Madura atau orang-orang yang memiliki darah bangsawan. Adapun ciri-ciri cerita rakyat yang ditulis pada fase ini adalah penggunaan aksara *jhâban* (anacaraka).

Fase keempat adalah fase literasi. Pada fase ini, orang Madura mentransformasikan cerita rakyat Madura ke dalam bentuk tulis. Beberapa cerita rakyat Madura diterbitkan di dalam surat kabar dan majalah. Ada pula yang diterbitkan dalam bentuk buku seperti yang dilakukan oleh Zawawi Imron. Bukunya berjudul *Cerita Rakyat dari Madura* terbitan Grasindo, Maduratna menulis buku yang berjudul *Joko Tole* terbitan Kartika Mulya Surabaya. Ciri-ciri cerita rakyat yang ditulis pada fase ini adalah penggunaan huruf alfabet dengan berbagai macam ejaan.

Fase kelima muncul ketika ketika era digital hadir. Di fase ini, para pemerhati budaya dan cerita rakyat, melakukan berbagai macam upaya agar masyarakat mengenal cerita rakyat Madura. Upaya pengenalan dilakukan melalui berbagai media daring atau media digital. Cerita-cerita ini dapat dibaca pada laman atau blog yang bertebaran di interne, seperti <http://www.ceritadongenganak.com>, <https://www.lontarmadura.com>, atau <https://ensiklopedimadura.wordpress.com>. Laman-laman tersebut memiliki komitmen untuk berbagi cerita rakyat kepada pengguna internet. Meskipun, pengelolaan laman masih belum dilakukan secara profesional. Karakteristik khas pada fase ini adalah penggunaan media digital untuk menampilkan cerita rakyat Madura secara tertulis. Pada fase ini pula, benih-benih kemunculan sebuah genre yang kemudian dikenal sebagai *E-lore* mulai terlihat (Azhar, 2017c).

Setelah masyarakat melewati fase kelima, yaitu digital tulis, kini masyarakat masuk ke fase keenam, yaitu digital visual. Di fase ini meskipun basisnya tetap internet, konten informasi yang disukai masyarakat beralih dari tulis menjadi lisan. Konten-konten yang dimaksud adalah konten informasi yang ada di *youtube* dan sejenisnya. Dengan adanya tren ini, diperlukan pula tampilan baru cerita rakyat Madura yang mudah diakses lewat *youtube*. Apa yang dilakukan ini bertujuan agar cerita rakyat Madura tetap bisa sampai di telinga masyarakat Indonesia dengan cara yang menyenangkan dan *up to date* (Nurgiyantoro, 2005). Usaha-usaha tersebut mengarah pada inisiasi pendirian Rumah Dongeng dan Klub Dongeng yang bekerja sama dengan televisi digital.

Cerita rakyat Madura kini juga ada di *podcast series youtube*. Penyebarluasan cerita rakyat Madura dilakukan, di antaranya, di kanal *podcast series youtube*. Kanal ini berupaya memopulerkan budaya mendongeng dengan menyebarluaskan video dongeng, dan pengetahuan tentang dongeng. Beberapa contoh unggahan cerita rakyat ini, misalnya, “Ke’ Lesap” oleh Hasan Sasra yang dapat diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=eUPp9didZuI> atau “Asal Usul Carok Madura” oleh Kyai Muzammil di <https://www.youtube.com/watch?v=XRPjhegIoiw>. Bentuk lain penyampaian cerita rakyat Madura digital visual ini adalah pementasan di panggung. Beberapa informasi terkait pementasan ini dapat dijumpai di berita di <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/17283>, dengan tajuk “pi 2009, tim pertura sumenep tampilkan cerita sejarah daerahnya.”

Fase ketujuh evolusi cerita rakyat Madura adalah sebuah fase yang kelak akan mengarahkan cerita rakyat Madura untuk bertransformasi menjadi Cerita Rakyat Internet Urban (CRIU). Fase ini adalah sebuah masa ketika versi penyampaian



cerita rakyat Madura dilakukan melalui perantara *video game*. Cerita Rakyat Internet Urban adalah cerita tentang peristiwa yang tidak biasa, lucu atau mengerikan berisi tema-tema yang berkaitan dengan dunia modern. Cerita disampaikan sebagai sesuatu yang telah atau mungkin telah terjadi dengan variasi yang ditemukan di banyak tempat dan waktu, dan mengandung implikasi moral. Cerita-cerita ini dapat ditukar dan direplikasi melalui interaksi lisan. Sumber media cetak seperti tabloid-tabloid *game* telah mereproduksi cerita rakyat urban dan menajamkan legitimasi terhadap cerita-cerita tersebut. Cerita-cerita tersebut seakan-akan memang benar adanya (Brunvand 2001). Kelak, cerita rakyat Madura akan bertransformasi menjadi bentuk ini.

### Layer Cerita Rakyat Madura

Cerita rakyat Madura jumlahnya cukup banyak. Dari hasil kajian lapangan yang dilakukan penulis selama 2 tahun (Maret 2016- November 2017), didapati setidaknya ada 119 cerita rakyat dengan struktur generik yang utuh yang menghiasi bentang cerita rakyat masyarakat Madura. Cerita rakyat tersebut seluruhnya bergenre naratif. Ke-119 cerita rakyat ini diambil karena dianggap dapat merepresentasikan cerita rakyat yang ada di Madura. Cerita rakyat tersebut didapat melalui wawancara terhadap masyarakat yang ada di daerah tempat cerita rakyat diceritakan.

Berikut ini adalah rekapitulasi cerita rakyat yang terkumpul. Adapun klasifikasi data berdasarkan isi narasinya dapat dilihat pada tabel berikut berikut.

**Tabel 1**  
**Isi Narasi Cerita Rakyat di Pulau Madura**

No.	Isi Narasi	Asal Cerita			
		Bkln	Smpng	Pmeksn	Smnep
1	Asal usul berdirinya sebuah lanmark	18	9	6	5
2	Kesaktian/kewalian tokoh masyarakat yang masih hidup	1	-	-	-
3	Kesaktian/kewalian tokoh yang sudah meninggal ( <i>bhuju'</i> )	14	6	2	-
4	Tempat-tempat mistik yang ada di daerah	4	-	2	-
5	Penyebaran agama Islam di Madura Barat	3	1	1	5
6	Asal-usul munculnya sebuah budaya di Madura Barat	2	-	-	-
7	Masalah perpecahan yang menyebabkan satu daerah bersatu atau terpecah	2	2	4	-
8	Perjuangan melawan Belanda dan pendukungnya	2	-	1	-
9	Insiden yang Bersifat Tragedi	3	-	-	1
10	Kutukan seorang tokoh yang menyebabkan bencana	-	4	-	-
11	Misi mencari lahan baru, lokasi baru untuk ditempati	-	-	1	2
12	Kematian seorang raja dalam perang	-	-	-	2
13	Bencana yang melanda karena kesalahan manusia	-	-	1	3
14	Pertarungan dua kesatria sakti, atau hewan dengan hewan	-	-	-	2



No.	Isi Narasi	Asal Cerita			
		Bkln	Smpng	Pmeksn	Smnep
15	Petualangan raksasa dalam melaksanakan tugas di Madura	-	-	-	1
16	Layangan yang terbang dengan membawa manusia	-	-	-	1
17	Pengalaman lucu seorang yang menjadi nama desa	-	-	-	1
18	Permasalahan seputar pembangunan sarana	-	-	2	-
19	Pusaka di dalam sumur	-	-	1	-
20	Kesetiaan istri pada suami	-	-	1	-
21	Pekerjaan orang zaman dahulu	-	-	1	-
22	Pelarian yang kalah perang	-	-	1	-
23	Tanah warisan kerajaan	-	-	1	-
		49	22	25	23
TOTAL				119	

Tabel di atas menunjukkan klasifikasi isi narasi cerita rakyat yang ditemukan dalam masyarakat Madura. Ada 23 klasifikasi variasi isi cerita rakyat, yang beberapa di antaranya dapat dibagi lagi menjadi berbagai variasi yang lebih kecil. Meskipun sangat variatif, cerita-cerita rakyat tersebut beberapa di antaranya memiliki ciri khas yang langsung dapat dikenali sebagai cerita rakyat yang berasal dari Madura. Kabupaten Bangkalan menyumbang cerita rakyat terbanyak, yaitu 49 buah, disusul Pamekasan (25 buah), Sumenep (23 buah) dan yang terakhir Sampang (22 buah).

Berdasarkan hasil analisis data, dapat digambarkan bahwa pembentukan cerita rakyat masyarakat Madura tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap dalam lima lapis kronologis (selanjutnya akan kita sebut sebagai *layer*). Pembentukan *layer* ini dipengaruhi oleh masa terjadinya cerita rakyat tersebut dan waktu saat masyarakat mulai menceritakan dan menyebarkanluaskannya dari mulut ke mulut. Secara umum, *layer-layer* cerita rakyat yang ditemukan di Madura adalah sebagai berikut.

Pertama adalah *layer* cerita rakyat klasik. Ini adalah masa saat sebuah proto cerita rakyat menjadi fondasi *layer-layer* yang lebih baru. Cerita rakyat yang berada di *layer* ini memberi pijakan pada penamaan mula-mula daerah yang ada di Madura. Kedua adalah *layer* cerita rakyat neoklasik. Ini adalah masa transisi, yaitu masa yang diisi oleh cerita rakyat yang hadir setelah cerita rakyat proto dan berada sebelum zaman penjajahan Belanda lama. Ketiga, *layer* cerita rakyat zaman tengah. *Layer* ini berisi cerita rakyat yang berlatar belakang zaman penjajahan Belanda melalui kamar dagang VOC. Keempat, *layer* cerita rakyat zaman Madura baru. Ini adalah *layer* yang berisi cerita rakyat zaman Madura baru yang merujuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara dan berakhir pada masa kemerdekaan. Kelima adalah *layer* cerita rakyat masa kini. Dikatakan “masa kini” karena terjadinya cerita rakyat berkisar antara tahun 1980-an hingga sekarang. Pelaku cerita rakyat adalah orang-orang yang hidup pada masa tersebut. Namun, cerita yang berkembang di masyarakat simpang siur, banyak diisi distorsi kronologi sehingga tidak layak disebut sebagai biografi atau sejarah. Kelima *layer* membangun secara berbeda peta cerita rakyat di Pulau Madura. Adapun sebaran *layer-layer* pada bentang peta dari cerita rakyat per kabupaten dapat dijelaskan pada bagian berikut.



1) Bentang Peta Cerita Rakyat Kabupaten Bangkalan  
Sebaran pertama cerita rakyat yang ada di Madura adalah sebaran yang ada di Kabupaten Bangkalan. (Lihat tabel di bawah ini.)

**Tabel 2**

**Layer Bentang Cerita Rakyat Masyarakat Bangkalan**

NO.	LAYER	TOKOH	CERITA RAKYAT
1	Layer Klasik	Bendoro Gung, Raden Segoro, Ki Poleng	Cerita rakyat dari Gunung Geger Arosbaya
		Jokotole, Dewi Retnadi	Asal Usul Socah, Telang
		Jokotole, Dewi Retnadi	Asal Usul Paseraman
2	Layer Neoklasik	Aryo Menak	Asal Usul Kenapa Orang Madura Makan Jagung
		Aryo Menak	Asal Usul Karang Anyar
		Lang Deur	Batu Cening
		Jokotole, Dempo Abang	Asal Usul Bancaran
		Anonim	Bhermanten Bancaran
		Pangeran Macan Putih	Macan Putih
		Anonim	Cerita rakyat Bhujuk Santri
		Anonim	Bhupanjheng Arosbaya
		Tong sari	Cerita rakyat Bhuju' Tong Sari
		Kiai sulaiman	Bilapoh dari Klampis
		H.Hadhori	Lerpak Lantong Geger
		Anonim	Asal Usul Banda Soleh
		3	Layer Zaman Tengah
Anonim	Asal Usul Klampis		
Anonim	Cerita rakyat Masjid Arosbaya		
R. A. Wahid Trunokusumo	Cerita rakyat Arosbaya		
Anonim	Dusun Banyuajuh Lajing		
Pangeran Pragalba dan Raden Adipati Pratanu	Kisah Pisang Agung		
Pangeran Pragalba dan Raden Adipati Pratanu	Makam Agung Arosbaya		
Anonim	Asal Usul Kampak		
Anonim	Banyuajuh Kamal		
Syarifah Ambami	Cerita rakyat Rato Ebhu		
Sakera, Brudin, Marlana	Sakera		
Anonim	Desa Kramat Bangkalan		
Anonim	Bhuju' Lomot Jaddih		
Anonim	Kampung Sumur Kembang		
Mbah Kiai Minah	Langgher Sabe Burneh		
4	Layer Zaman Baru	Ke' Lesap	Asal usul Bangkalan
		Mohammad Yasin	Kampung Kepang
		Anonim	Asal Usul Kramatikus
		Kiai serembang dan Kiai Rembah	Peterongan Galis
		Raden Aji Noto kusumo	Cerita rakyat Bhujuk Haji Ponteh
		Bhuju' Hara	Cerita rakyat Bhuju' Hara
		Pak petok dan Buju' Galis	Cerita rakyat Pak Petok
		Bhuju' Rambesi	Cerita rakyat Sumber Tattatan Tlokoh Kokop





NO.	LAYER	TOKOH	CERITA RAKYAT
		Anonim	Asal Usul Kampung Bang Temuran
		Kiai Abdul Adim/Kiai Shohib	Dusun Tambak Agung Baengas
		Anonim	Asal Usul Sekarbungoh
		Anonim	Asal Usul Pancoran
		Abdul Basyir	Asal Usul Mancingan
		Mbah Saronen	Cerita rakyat Bhujuk Saronen
		Bhaju Achmad, Bhaju' Tarhes Bhaju Markun	Berkoneng Gili Kamal
		Anonim	Asal Usul Banyu Bunih
		Maria	Si Cantik dari Pedeng
5	Layer Masa Kini	Anonim	Rumah Batik yang Cerita rakyatis
		Ra Lilur	Cerita rakyat Ra Lilur

Di Bangkalan, cerita rakyat yang berada dalam *layer* cerita rakyat klasik adalah cerita rakyat tentang asal usul Madura yang melibatkan tokoh Bendoro Gung, Pangeran Segara, dan Ki Poleng. Adapun, pengisi *layer* neoklasik adalah cerita rakyat yang berisi keseluruhan cerita tentang Jokotole yang melibatkan tokoh Jokotole, Potre Koneng, Dewi Retnadi, Adipoday, Adirasa, Joko Wedi, dan Empu Kelleng, cerita rakyat Aryo Menak, serta cerita rakyat pertempuran Jokotole dengan Dempo Abang. *Layer* cerita rakyat zaman tengah melibatkan tokoh-tokoh yang lebih variatif. Tokoh-tokoh seperti Tong Sari, Kiai Sulaiman, H. Hadhori, Raja Arosbaya, R. Abdul Wahid Trunokusumo, Pangeran Macan Putih, Pangeran Pragalba serta Raden Adipati Pratanu dan Syarifah Ambami adalah sederet tokoh yang mengisi cerita rakyat pada *layer* ini. *Layer* yang berisi cerita rakyat-cerita rakyat zaman Madura baru berisi kisah Ke' Lesap, Sakera, Brudin, Marlana, Mbah Kiai Minah, Mohammad Yasin, Kiai Serembang dan Kiai Rembah, Raden Aji Noto Kusumo, Bhaju' Hara, Pak Petok dan Buju' Galis, Buju' Rambesi, Ke' Lesap, Kiai Abdul Adim/Kiai Shohib, Abdul Basyir, Mbah Saronen, Buju Achmad, Buju' Tarhes Buju Markun dan Buju Achmad, dan Buju' Tarhes Buju Markun. Jenis cerita rakyat masyarakat Bangkalan terakhir adalah cerita rakyat masa kini. Contoh cerita rakyat ini adalah cerita rakyat "Si Cantik dari Pedeng" dan "Ra Lilur".

Cerita rakyat yang ada di Kabupaten Bangkalan memiliki beberapa hal unik penanda cerita rakyat masyarakat Bangkalan. Pertama, ada dua cerita rakyat yang mengisahkan karakter perempuan Madura yang kuat, yakni Bendoro Gung dan Dewi Retnadi. Keduanya secara fisik digambarkan sebagai seorang putri cantik dan bersifat baik. Keduanya mengalami masalah yang sama, yaitu hamil secara gaib. Dari dua perempuan ini, lahir pemuda-pemuda pemimpin daerah Madura yang memiliki kecakapan yang tinggi (Pangeran Segoro dari Bendoro Gung dan Jokotole dari Dewi Saini). Dua figur perempuan ini sangat dihormati oleh orang Madura dan dianggap sebagai pemimpin. Kedua, kebanyakan isi cerita rakyat Bangkalan berkisar tentang asal usul berdirinya masjid, asal usul adanya hutan, sumber air, sumber api, maupun tempat lain seperti pemandian disertai kisah kesaktian/kewalian tokoh masyarakat yang sudah meninggal dan dikeramatkan dengan cara disebut. Ini disebut sebagai *bhaju.*' Ketiga, dalam cerita rakyat Sumenep, dijumpai kisah petualangan raksasa yang gagal dalam melaksanakan tugas membawa mustika ke daerah Madura Timur, tetapi mengalami hambatan yang sangat berat di Bangkalan.

## 2) Bentang Peta Cerita Rakyat Kabupaten Sampang

Bentang cerita rakyat Kabupaten Sampang bentuknya lebih sederhana dari yang ada di Bangkalan karena terdiri atas lebih sedikit *layer*, yaitu zaman klasik, zaman neoklasik, zaman tengah, dan zaman Baru. Sampang dalam berapa waktu yang lama berada dalam zona ketidakpastian, dalam artian, bahwa Sampang pada masa lampau tidak muncul sebagai sebuah daerah yang mandiri dan kuat sehingga dapat memiliki otoritas yang tinggi, seperti Sumenep, Pamekasan, dan Bangkalan. Dalam sejarahnya, Sampang berkali-kali diposisikan sebagai daerah kewedanan, baik itu kewedanan yang bergabung dengan Kadipaten Madura Barat dengan Kota Raja Bangkalan maupun kewedanan yang bergabung dengan Kadipaten Pamekasan, dengan Kota Raja Pamekasan. Oleh sebab itu, cerita rakyat yang ada di kabupaten ini banyak terinspirasi oleh cerita rakyat di dua kabupaten yang lain.

**Tabel 3**

***Layer* Bentang Cerita Rakyat Masyarakat Sampang**

NO.	LAYER	TOKOH	CERITA RAKYAT
1	<i>Layer</i> Klasik	Bendoro Gung, Raden Segoro, Ki Poleng	Asal Usul Desa Nepa, dan Kera- Kera Penghuni Hutan Nepa
		Jokotole, Dewi Retnadi, Adipoday	Asal Usul Desa Omben, Banyubanger dan Sampang
2	<i>Layer</i> Neoklasik	Anonim, Adirasa	Cerita rakyat Sang Penjaga Pantai Taralam
		Panjilaras, Anonim	Cerita rakyat Panji Laras Madegan
		Putri Nandi (Kencana Wungu)	Cerita rakyat Putri Nandi dan Asal Usul
		Jokotole, Sam Po Tualang	Asal Usul Dusun Batolenger
		Syekh Abdul Jabbar Al Yamani	Asal Usul Desa Napo
		Raden Sasongko	Asal Usul Desa Banyuates
		Sagatra, Sagatro, Sraba, Astra	Asal Usul Sokobanah
		Anonim	Asal Usul Desa Nagasareh
		Raden Kabul	Asal Usul Desa Tragih dan Torjunan
		Bhuju' Buddih, Bhuju' Taneh, Raja Harimau	Asal Usul Desa Bapelle
3	<i>Layer</i> Zaman Tengah	Anonim	Asal Usul Dusun Kajuabuh
		Juju' Jhudah	Asal Usul Desa Kalangan Prao
		Juju' So'on, Kyai Raden Mas Utawi, Pangeran Aji Wongso	Asal Usul Desa Banyusokah dan Dusun Sadah
		Bangsacara, Ragapadmi, Raja Bidarba, Bangsapati	Asal Usul Desa Pulau Mandangin dan Tragedi Bangsacara- Ragapadmi
		Mangun Segoro	Asal Usul Desa Tapa'an
		Armina (Ke' Lesap), Pangeran Cakraningrat V	Asal Usul Desa Morbatoh
		Lembu Peteng	Asal Usul Dusun Madegan
		Nursita	Asal Usul Desa Le Pelle
		Si Merah, Si Biru, Si Hijau, Si Ungu, Si Kuning.	Asal Usul Desa Kamoning
		4	<i>Layer</i> Zaman Baru



Di Sampang, *layer* klasik diisi oleh cerita rakyat yang berhubungan dengan asal usul munculnya kata Madura, dengan tokoh Bendoro Gung, Raden Segoro, dan Ki Poleng. Selain memunculkan istilah Madura, cerita rakyat ini juga menjelaskan asal usul munculnya Desa Nepa dan kera-kera yang menghuni hutan Nepa, Kecamatan Banyuates Sampang. *Layer* neoklasik muncul sebagai lapis kedua pembentuk bentang cerita rakyat Sampang. Sama seperti yang ada di Bangkalan, *layer* ini juga diisi oleh cerita rakyat yang berhubungan dengan Jokotole dan Dewi Retnadi. Meskipun, ceritanya tidak sepanjang cerita yang ada di Bangkalan. *Layer* ini juga diisi oleh dua cerita rakyat yang lain, yaitu cerita rakyat "Sang Penjaga Pantai Taralam" yang tokoh utamanya adalah seorang pemuda anonim, dan Adirasa yang merupakan paman dari Jokotole, serta cerita rakyat "Panji Laras Madegan" dengan tokoh Panji Laras dan raja anonim. *Layer* zaman tengah diisi oleh cerita rakyat yang ceritanya sangat variatif seperti "Asal Usul Desa Napo" dengan tokoh Syekh Abdul Jabbar Al Yamani, "Asal usul Desa Banyuates" dengan tokoh Raden Sasongko, "Asal Usul Sokobanah" dengan tokoh Sagatra, Sagatro, Sraba, Astra, "Asal Usul Desa Nagasareh", "Asal Usul Desa Tragih" dan "Torjunan" dengan tokoh Raden Kabul, "Asal Usul Desa Bapelle" dengan tokoh Bhuju' Buddih, Bhuju' Taneh serta Raja Harimau, "Asal Usul Dusun Kajuabuh", "Asal Usul Desa Kalangan Prao", "Asal Usul Desa Banyusokah" dan "Dusun Sadah" dengan tokoh Juju' So'on, Kyai Raden Mas Utawi, serta Pangeran Aji Wongso. *Layer* zaman baru diisi oleh cerita rakyat "Asal Usul Desa Polagan". Cerita ini menjadikan perselisihan tokoh Raden Ronggo, gubernur, dan wedana sebagai bahannya.

Bentang cerita rakyat Sampang memiliki kekhasan yang berkaitan dengan isi narasinya. Pertama, isi narasi cerita rakyat yang paling banyak muncul adalah asal usul berdirinya sebuah *landmark*, seperti masjid, hutan, sumber air, sumber api, maupun tempat seperti pemandian, kesaktian/kewalian tokoh masyarakat yang sudah meninggal dan dikeramatkan dengan cara disebut sebagai bhuju'. Kedua, masyarakat Sampang mengenal cerita rakyat yang berhubungan dengan kutukan seorang tokoh yang menyebabkan bencana/perubahan pada suatu daerah yang akhirnya menjadi nama daerah tersebut. Hanya di Sampang sajalah cerita rakyat dengan narasi ini dijumpai. Ketiga, cerita rakyat masyarakat Sampang juga mengenal karakter perempuan Madura yang kuat, yaitu Bendoro Gung, Potre Koneng, Ratu Ayu Kencana Wungu, dan Dewi Retnadi. Khusus Ratu Ayu Kencana Wungu, figur ini hanya muncul di Sampang dan digambarkan sebagai seorang ratu yang cantik dan perkasa, yang mampu menundukkan banyak kerajaan.

### 3) Bentang Cerita Rakyat Kabupaten Pamekasan

Ada 25 judul cerita rakyat di Kabupaten Pamekasan yang direkam dari beberapa daerah yang tersebar di Kabupaten Pamekasan. Berbeda dengan Bangkalan yang memiliki 5 *layer*, Sampang yang memiliki 4 *layer*, cerita rakyat Kabupaten Pamekasan hanya memiliki 2 *layer*, yaitu zaman neoklasik dan zaman tengah.

**Tabel 4**  
**Layer Cerita Rakyat Kabupaten Pamekasan**

NO.	LAYER	TOKOH	CERITA RAKYAT
1	<i>Layer</i> neoklasik	Kyai Khoberi (Kyai Ra'as)	Asal Usul Nama Desa Trasak
		Bhuju' Dukon	Asal Usul Desa Bajang
		Bujhu' Miyos	Asal Mula Desa Sotabar



NO.	LAYER	TOKOH	CERITA RAKYAT
		Samor dan Phajer	Asal Usul Kampung Somor Jhejher dan Kampung Somor Ghendis
		Pemuda (Anonim)	Asal Usul Desa Blumbungan
		Kyai Kiramang Katibing, Bhuju' Balai dan Bhuju' Agung, Kyai Mudakkir	Asal-Usul Galis
		Pangeran Ronggosukowati, Pangeran Lemah Duwur	Cerita rakyat Kolam Si Ko'ol
		Kyai (Anonim)	Asal Mula Desa Batu Kerbuy
		Anonim	Asal Usul Desa Panegguwan
		Kyai Barsila, Nyai Barsiti, Kyai Danari	Asal Usul Desa Tampojung Pregi
		Raden Wikno (Keh Moko)	Asal Usul Desa Larangan Tokol
		Empu Kelleng (Kyai Pademawu)	Asal-Usul Pademawu Barat
		Ki Agung sejarah	Asal Usul Sumber Kullah Desa Kaljan Dempo-Timur Pasean
		Syech Abdur Rahman (Bhuju' Langghar)	Asal Usul Desa Teja Barat dan Timur
		Anonim	Asal Usul Desa Kramat Kecamatan Tlanakan
		Ki Paing	Asal Usul Desa Murtajih
		Keh Moko	Asal Usul Api Tak Kunjung Padam
		Kyai Abdul Manan	Asal Dusun Kosambi
		Kyai Basyiniyah	Asal Usul Batuampar
		Pangeran Ronggosukowati	Asal Usul Pamekasan dan Kelurahan Kolpajung
		Si Lokek dan Syukur	Asal Usul Mengapa Air Laut Asin
		Anggosuto dan Gandha	Asal Usul Kampung Begandan
		Pangeran Ronggosukowati	Asal Usul Desa Toroan
		pasangan suami istri tanpa nama	Asal Usul Dusun Soloh Lauk dan Soloh Degeh
2	Layer zaman tengah	Wali Amin, Rajeh Malah dan Nanti	Asal Usul Desa Tlonta Rajah

*Layer* neoklasik Kabupaten Pamekasan diisi oleh cerita rakyat yang berhubungan dengan raja-raja Pamekasan mulai dari era sebelum dan setelah pangeran Ronggosukowati dan tokoh-tokoh kerajaan lainnya. *Layer* zaman tengah diisi oleh cerita rakyat “Asal Usul Desa Tlonta Rajah”.

Beberapa temuan menarik dapat dijumpai dalam cerita rakyat. Pertama, banyak dijumpai tokoh utama seorang pertapa. Kedua, beberapa cerita rakyat di Pamekasan memiliki hubungan yang kuat dengan masalah seputar air. Ketiga, selain masalah air dan penemuan sumber-sumber air, sumber api pun juga muncul dalam cerita rakyat Pamekasan. Keempat, cerita rakyat di Pamekasan kental dengan penyebaran agama Islam di Pulau Madura. Kelima, beberapa cerita rakyat di Pamekasan menggambarkan pertikaian antarwarganya dengan berbagai alasan. Ini dapat dilihat dari nama-nama desa yang muncul karena latar belakang ini. Kelima karakter inilah yang menjadi ciri pembeda cerita rakyat Pamekasan dengan cerita rakyat kabupaten lainnya.



#### 4) Bentang Cerita Rakyat Kabupaten Sumenep

Ada 23 judul cerita rakyat di Kabupaten Sumenep. Ke-23 cerita rakyat ini secara lebih detail dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 5**  
**Layer Cerita Rakyat Kabupaten Sumenep**

NO.	LAYER	TOKOH	CERITA RAKYAT
1	Layer Klasik	Banyak Wide (Arya Wiraraja)	Arya <i>dâri Songenep</i>
2	Layer Neoklasik	Ki Agung Abdullah, Nyai Sitti Hawa	Asal Usul Desa Beluk Raja,
		Hamba	Asal Usul Desa Bakeong
		Maysarak	Asal Usul Sumber Kacceng
		Raden Agung Rawit	Asal Usul Kampung Mambang dan Desa Banasare
		Raden Agung Rawit	Asal Usul Desa di Pulau Gili Raja
		Jokotole, Jokowedi	Asal Usul Desa Totosan, Kolpong, Tamidung, Tang-Batang dan Sa-Assa
		Pangeran Lor dan Pangeran Wetan	Asal Usul Desa Gersik Putih, Kasengan dan Beraji
		Raden Agung Rawit	Asal Usul Desa Aeng Panas,
		Anonim	Asal Usul Desa Pamoangan,
		Raja Sumenep (Anonim)	Asal Usul Desa Panaongan
		Mpu Murkali	Asal Usul Karang Duak,
		Syech Ahmad Baidawi	Asal Usul Kerapan Sapi dan Desa Parsanga
		Kyai Marur, Nuron dan Rokip	Asal Usul Batu Cening dan Desa Semma'an
		Bhindhara Saod, R. Ayu Rasmana	Bhindhara Saod dan Asal Usul Desa Dungkek
		Kyai Ali Barabgbang	Cerita rakyat Kera Diajar Ngaji
		Raja (Anonim), Buto Ijo	Asal Usul Dusun Ghunong Pekol
		Jokotole, Sam Po Tua Lang	Asal Usul Desa Guluk-Guluk
		Ayam dan Buaya	Asal Usul Desa Aeng Baja Rajah
		Raden Ario Tirtodiningrat	Asal Usul Desa Ambunten dan Cerita rakyat Karang Menangis
		Raden Sungging Pamangkoro, Patih Gajah	Asal Usul Desa Karduluk
		Pemuda Sengau	Asal Usul Desa Lalangon

Bentang cerita rakyat Sumenep hanya terbagi menjadi 2 *layer* saja. *Layer* pertama adalah *layer* zaman klasik. Bentang cerita rakyat ini diisi oleh cerita rakyat “Asal Usul Sumenep” yang diambil dari kondisi geografis yang berbentuk lembah yang rindang dan tenang serta peran Arya Wiraraja dalam memajukan Sumenep. *Layer* kedua adalah zaman neoklasik. Bentang cerita rakyat ini diisi oleh cerita rakyat yang muncul selepas era *layer* yang diisi oleh Arya Wiraraja. Di Sumenep, *layer* ini juga diisi oleh cerita rakyat yang berhubungan dengan raja-raja Sumenep selepas era Arya Wiraraja, seperti Raden Agung Rawit, Pangeran Bukabu, Pangeran Bragung, Jokotole, dan Dewi Retnadi.

Cerita rakyat di Sumenep memiliki kekhasan isi narasinya. Pertama, dalam cerita rakyat Sumenep, banyak dijumpai cerita seputar perjuangan dan kesaktian pendakwah ketika menyebarkan agama Islam. Kedua, dalam cerita rakyat Sumenep, dijumpai cerita rakyat tentang kematian seorang raja. Ketiga, dalam



cerita rakyat Sumenep, dijumpai kisah petualangan raksasa yang gagal dalam melaksanakan tugas membawa mustika ke daerah Madura Timur. Unikinya, cerita ini masih ada hubungannya dengan cerita raksasa yang ada di Bangkalan. Keempat, dalam cerita rakyat Sumenep, dikenal cerita rakyat yang berhubungan dengan fabel, yaitu pertarungan hewan dengan hewan (ayam jantan dan buaya) yang melahirkan nama desa. Kelima, dalam cerita rakyat Sumenep, dikenal cerita tragedi kisah tragis sepasang pengantin baru. Keenam, dalam cerita rakyat Sumenep, dikenal cerita layang-layang yang terbang dengan membawa manusia. Ketujuh, dalam cerita rakyat Sumenep, dikenal cerita naratif yang kocak pengalaman seorang yang memiliki kekurangan secara fisik yang secara kebetulan diangkat menjadi nama sebuah desa. Cerita rakyat yang unik ini tidak dijumpai keberadaannya di daerah lain di Madura.

### **Sekilas tentang Kontur Cerita Rakyat Madura**

Selain menunjukkan *layer*, bentang cerita rakyat Madura juga menggambarkan kontur cerita rakyat yang berserakan di seluruh daerah Madura. Kontur dalam penelitian ini didefinisikan sebagai posisi sebaran sebuah cerita rakyat serta kemungkinan relasinya dengan cerita rakyat yang ada di tempat lain. Kontur berbeda dengan *layer*. Jika *layer* mengelompokkan cerita rakyat berdasarkan waktu terjadinya atau dengan kata lain tersusun secara vertikal, kontur mengelompokkan cerita rakyat berdasarkan sebarannya di cerita rakyat yang tersusun secara horizontal.

Memetakan kontur cerita rakyat ini sangatlah rumit karena jumlah cerita rakyat Madura cukup banyak. Berbagai kemungkinan relasi antarcerita rakyat Madura dapat saja terjadi. Karena keterbatasan spasi dalam penelitian ini, penelitian ini hanya akan membahas beberapa jejaring cerita rakyat yang mengisi bentang cerita rakyat Pulau Madura.

Berdasarkan hubungan ceritanya, kontur bentang cerita rakyat masyarakat Madura Barat dibagi menjadi tiga, yaitu kontur utara, kontur tengah dan kontur selatan. Setiap kontur diisi oleh cerita rakyat yang terkadang memiliki hubungan yang berasal dari *layer* yang berbeda.

Di kontur Utara Madura, tepatnya di sepanjang Pantai Utara Bangkalan, jejaring cerita yang mengisinya adalah cerita rakyat dengan tokoh utama Bendoro Gung, Raden Segara dan Ki Poleng yang dinarasikan dalam kisah “Asal Usul Madura dan Hutan Nepa”. Selain, kisah tiga tokoh ini, cerita rakyat “Rato Ebhu”pun juga turut merentangkan jejaringnya di kontur ini.

Di kontur Tengah Madura, sebagian besar jejaring cerita rakyat diisi oleh cerita Jokotole dan Ke’ Lesap. Kisah Jokotole ini sangat panjang. Jokotole dikisahkan melaksanakan sebuah perjalanan jauh dari Majapahit ke Sumenep. Setiap kota yang ia singgahi di Madura melahirkan cerita rakyat tentang dirinya. Adapun, Ke’ Lesap, kampanye dirinya untuk menuntut takhta Bangkalan menyebabkan ia harus melakukan serangkaian peperangan yang dimulai dari Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan balik lagi ke Bangkalan. Hal ini menjadikannya sukses dibicarakan di banyak tempat di Madura sebagai tokoh legendaris.

Di kontur Selatan, jejaring diisi oleh cerita rakyat tokoh Aryo Menak (Menak Senoyo) dan Panjilaras. Di bagian Selatan, jejaring cerita rakyat yang hegemonis tidak banyak terungkap.



Ada sebuah temuan unik seputar kontur cerita rakyat Madura. Temuan ini adalah seputar kisah kepahlawaan Pangeran Trunojoyo di Madura. Meskipun Pangeran Trunojoyo terkenal keberaniannya melawan Belanda dan Kerajaan Mataram (lihat Jonge, 2011), jejak langkah pangeran Trunojoyo tidak begitu terlihat di Madura. Ini dapat dilihat dari 119 cerita yang menjadi subjek kajian penelitian ini, tidak ada satupun yang menceritakan kejadian yang berhubungan dengan Pangeran Trunojoyo. Ini tidaklah mengherankan karena pada saat Pangeran Trunojoyo melakukan kampanyenya melawan Belanda, ia dianggap sebagai figur kontroversial. Ia dianggap sebagai pahlawan di Madura, tetapi di daerah Mataram, ia dianggap sebagai pengkhianat. Setelah Trunojoyo berhasil “disingkirkan” oleh Mataram melalui perantara Belanda. Kekuasaan Madura yang ada di antara dua pihak, yaitu Belanda dan Mataram nama Trunojoyo seakan-akan dihapus dalam cerita rakyat Madura. Hal ini menyebabkan nama Trunojoyo tidak diingat dengan akar yang kuat dalam benak masyarakat.

### **Elemen Pembentuk Isi Cerita Rakyat Madura**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi narasi cerita rakyat Madura dipengaruhi oleh banyak elemen budaya. Ada lima elemen budaya yang menonjol penampakannya dalam cerita rakyat Madura. Berikut ini adalah lima elemen besar yang berperan dalam mengembangkan jalannya cerita rakyat Madura.

Elemen pertama adalah elemen budaya Jawa. Elemen ini memberi warna tersendiri dalam cerita rakyat Madura khususnya dalam penunjukan identitas daerah serta tokoh-tokoh penguasa. Latar cerita rakyat Madura yang berlatar belakang kerajaan, para pemimpinnya kebanyakan memiliki nama bernuansa Jawa. Tidak hanya itu, alat-alat pertanian Jawa seperti bajak, konsep-konsep pertanian seperti parit, serta kebudayaan maskulinisme Jawa seperti aduan ayam, masuk ke dalam cerita rakyat Madura dan turut serta mengembangkan alur cerita.

Elemen kedua adalah elemen Islam. Unsur-unsur Islam banyak memengaruhi alur cerita. Hal ini terjadi karena tokoh-tokoh utamanya dalam proses ceritanya menyanggah amanah misi keislaman, yaitu menyebarkan agama Islam. Selain itu, unsur-unsur Islam dijumpai pada nama-nama tokoh utama. Nama tokoh utama banyak yang bernuansa Islam, serta biasanya diberi gelar ulama, kyai, atau syekh yang merujuk pada identitas Islam (Azhar, 2017b).

Elemen budaya ketiga adalah elemen budaya lokal, yaitu budaya Madura sendiri. Elemen ini muncul membentuk latar cerita yang sangat distingtif karena menyorot kondisi kehidupan Madura dan orang Madura yang sebenarnya. Cerita rakyat Madura yang berlatar kondisi alam gersang, panas, sulit untuk mendapatkan air, memiliki masyarakat yang kurang terpelajar, dan percaya pada hal-hal yang bersifat supranatural, serta temperamental, dipengaruhi oleh elemen geografis dan budaya lokal Madura.

Elemen keempat adalah elemen Hindu. Elemen ini kebanyakan memberikan warna pada cerita rakyat Madura dalam hal kepercayaan, seperti kepercayaan pada kekuatan mistis dari benda-benda, kepercayaan pada hari baik dan nasib baik. Elemen ini menyebabkan cerita rakyat Madura menjadi makin menarik untuk didengar.

Elemen kelima, yaitu kebudayaan Cina. Elemen ini membangun cerita Madura dalam dua hal. Pertama elemen ini adalah memberi variasi pada tokoh dan benda-benda yang terlibat dalam cerita, seperti kemunculan tokoh Cina Sam Po Tualang,



naga (cerita naga sangat populer di Cina). Yang kedua adalah sebagai unsur eksternal yang sering kali digambarkan bermaksud melakukan penetrasi terhadap kehidupan damai orang Madura. Dalam beberapa cerita dikisahkan bahwa orang Cina sering diposisikan sebagai orang luar yang bermaksud melakukan tindakan penyerangan, pengacauan keamanan dan ketertiban (Azhar, 2017b).

## **PENUTUP**

Dari apa yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa bentuk cerita rakyat Madura telah mengalami metamorfosis yang luar biasa sebelum menjadi cerita rakyat yang dijumpai sekarang. Cerita rakyat Madura mengalami tujuh fase perubahan yaitu fase masa tradisi lisan, fase masa sabak, fase masa transisi lisan ke tulis, fase masa literasi, fase masa era digital tulis, fase masa digital visual, fase cerita rakyat internet urban (Siberlore).

Adapun, terkait peta cerita rakyat Madura dapat disampaikan bahwa 119 cerita rakyat memiliki 23 variasi isi cerita. Ke-23 variasi tersebut dapat dibagi lagi menjadi berbagai variasi yang lebih kecil. Cerita rakyat ini juga mengisi lima *layer* vertikal (*Layer* Cerita Rakyat Klasik, *Layer* Cerita Rakyat Neoklasik, *Layer* Cerita Rakyat Zaman Tengah, *Layer* Cerita Rakyat Zaman Madura Baru, dan *Layer* Cerita Rakyat Zaman Masa Kini) dan tiga kontur horizontal (Kontur Utara, Tengah, Selatan). Cerita rakyat itu pula ternyata dipengaruhi oleh lima elemen pembangun, yaitu elemen budaya Jawa, Islam, lokal Madura, Hindu, dan Cina. Seluruh komponen di atas membentuk apa yang disebut peta cerita rakyat Madura, atau meminjam istilah penulis sebagai “Legenskap Madura.”

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pernyataan William R. Bascom (dalam Sims dan Stephens, 2005: 175) yang menyebutkan bahwa cerita rakyat merupakan sebuah cara untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan menginformasikannya ke kelompok masyarakat ternyata benar adanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, A. (2011). Cerita Rakyat Pulau Raas dalam Konteks Psikoanalisis Carl G. Jung. *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, 24(2), hlm. 109-116.
- Azhar, I. N. (2017a). Konsep Penjagaan Diri Masyarakat Madura Seperti Tersirat dalam Cerita Rakyatnya dalam *Prosiding Seminar Nasional Kajian Mutakhir Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah untuk Membangun Kebhinekatunggalikaan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Program Studi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, hal 72-81
- Azhar, I. N. (2017b). *Oréng Madhurâ: Keyakinan, Prinsip Hidup dan Potensi Tersembunyinya* Yogyakarta. LKIS.
- Azhar, I. N. (2017c). *Metamorfosis Cerita Rakyat Masyarakat Madura: Dari Zaman Prasabak Hingga Era Digital*. Artikel Dipresentasikan di *SENABASABUDI Universitas Trunojoyo Madura 25 November 2017*
- Brunvand, J. H (2001). “Folklore in the News (and, Incidentally, On the Net.” *Western Folklore*, Vol. 60, No. 1, pp. 47-66
- Bustami, L. (2003). “Folklor Kangean: Suatu kajian cerita bajak laut (Lanun) sebagai sumber sejarah kawasan”. *Bahasa dan Seni*, 32(2), hlm 267-285  
<http://sosbud.kompasiana.com/2013/03/16/pelestarian-dan-revitalisasi-seni-etnik-madura-masih-perlukah-537767.html>





- <https://www.lontarmadura.com>  
<http://www.ceritadongenganak.com>  
<https://ensiklopedimadura.wordpress.com>  
[https://www.youtube.com/channel/UCpQ8ty\\_w1VHBy0NvGNH9PIA](https://www.youtube.com/channel/UCpQ8ty_w1VHBy0NvGNH9PIA)  
<https://www.youtube.com/watch?v=eUPp9didZuI>  
<https://www.youtube.com/watch?v=XRPjhegIoiw>  
<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/17283>  
Imron, Z. (tanpa tahun). *Cerita Rakyat dari Madura*. -: Grasindo  
Jonge, d.H (2011). *Garam Kekerasan dan Aduan Sapi*. LKiS  
Maduratna. (tanpa tahun). *Joko Tole*. Surabaya: Kartika Mulya Surabaya.  
Kosim, M. (2007). Kerapan sapi; “Pesta” rakyat Madura (perspektif historis-normatif). *Karsa*, XI (1), hlm 68-76  
Nurgiyantoro, B. (2005). *Sastra Anak: Pengantar Pemahaman Dunia Anak*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.  
Miles, M.B dan A.M Huberman (1994). *Qualitative data analysis*. California: SAGE Publications Inc  
Sims, M. C and Stephens, M (2005). *Living Folklore*. Utah: Utah State University Press.  
Sudaryanto (1990). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.  
Soedjidjono. (2002). *Legenda dari Pulau Bawean. Kajian dengan Pendekatan Arketipal*. Prosiding Seminar Akademik, Volume 2  
Van Dijk et al. (penyunting) (1995), *Across Madura Strait: The Dynamics Of An Insular Society*, Leiden: KITLV Press, hlm. 209-220.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 4 Kelompok 1**

Pembicara : Iqbal Nurul Azhar  
Judul Makalah: “Konstruksi Peta Cerita Rakyat Madura di Pulau Madura”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 13.45—15.15  
Moderator : Dr. Sastri Sunarti  
Pencatat : 1. Dina Alfiyanti Fasa  
2. Ibnu Kharish

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Ada kondisi yang sangat jauh antara cerita rakyat Madura di zaman dahulu dan zaman sekarang.
2. Dahulu cerita rakyat Madura sangat diminati, tetapi saat ini cerita rakyat Madura kurang diminati mungkin karena pengaruh media televisi dan internet.
3. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan metamorfosis cerita rakyat Madura, menjelaskan peta cerita rakyat Madura, dan pada akhirnya menerbitkan Antologi Cerita Rakyat Madura.
4. Penelitian ini menggunakan 119 cerita rakyat Madura.
5. Metamorfosis bentuk cerita rakyat masyarakat Madura meliputi fase awal yang berbentuk tradisi lisan, fase kedua berbentuk sabak (bentuk tulis), fase ketiga merupakan transisi antara masa lisan dan tulis berbentuk lembar tipis dengan alat cetak pengganti sabak, fase keempat merupakan fase literasi berbentuk terbitan dalam surat kabar atau majalah, fase kelima merupakan fase pada era digital, fase keenam merupakan fase digital visual, dan fase ketujuh berbentuk cerita rakyat internet urban.
6. Data yang ditemukan dapat diteliti berdasarkan lapisan karena cerita rakyat muncul dalam beberapa lapisan.
7. Penelitian menemukan lima *layer* dan kontur. Dari layer dan kontur yang ditemukan, ada beberapa cerita rakyat yang memiliki hubungan.
8. Ada lima elemen yang membentuk cerita rakyat Madura, yaitu elemen Cina, Hindu, Jawa (berupa nama-nama jawa), Islam (berupa ajaran Islam dan tokoh Islam), dan lokal Madura (tokoh berwatak keras, tanah yang gersang).

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Lina  
Instansi : UNPAD

**Pertanyaan:**

Kekerabatan Sastra Nusantara dapat dilihat dari berbagai aspek. Bagaimana dengan motif oedipus jika ada beberapa cerita yang mengangkat motif tersebut apakah berarti bahwa mereka berkerabat?



**Jawaban:**

1. Di Madura saya belum menemukan cerita-cerita rakyat yang mengangkat motif oedipus. Hal ini mungkin terjadi karena secara turun-temurun percintaan antara ibu dan anak tidak boleh terjadi berdasarkan ajaran Islam orang-orang dahulu di Madura.
2. Hal yang menarik untuk dilihat adalah konteks budaya tempat cerita-cerita tersebut berkembang. Bagaimana motif tersebut muncul dalam konteks budaya yang berbeda-beda. Unsur-unsur politis, ajaran agama, dan sebagainya dapat menjadi latar belakang budaya dalam kemunculan motif tersebut.

**Penanya 2**

Nama : Taufik Darmawan

Instansi : UNM

**Pertanyaan:**

Kita mempunyai aset yang sangat kaya, tetapi tidak memanfaatkannya dengan maksimal. Ada pernyataan yang saya dengar dari teman dari luar negeri, “Ketika kami yang Barat kehilangan identitas, kalian yang Timur punya segalanya, tetapi malah ingin menghilangkannya.” Iklim di Indonesia tampaknya belum ada perhatian terhadap budaya. Di bidang pembangunan pun budaya tidak menjadi prioritas. Bagaimana pendapat Ibu mengenai fenomena seperti ini ketika kita memiliki kebudayaan, tetapi para pemegang kepentingan tidak memihak?

**Jawaban:**

1. Di Madura pemerintah daerah belum memperhatikan perkembangan bahasa dan sastra. Hal yang berbeda terjadi untuk seni. Pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan seni di Madura. Para seniman di Madura mulai bersepakat untuk mulai memasukkan sastra dalam kegiatan seni mereka.
2. Budaya dianggap kelas dua dan itu memang dilakukan oleh pemangku kebijakan. Namun, kita sebagai masyarakat harus melakukan gerakan budaya. Cara berpikir juga termasuk budaya. Guru-guru posisinya juga penting. Mereka perlu memahami budaya agar dapat mengajarkannya kepada para peserta didik. Partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk meyakinkan para pemangku kebijakan tersebut.

**Penanya 3**

Nama : Esti Ismawati

Instansi : Klaten

**Pertanyaan:**

Ada cerita rakyat Madura yang serupa dengan cerita wayang. Apakah cerita wayang juga menjadi inspirasi cerita rakyat Madura?

**Jawaban:**

Pengaruh wayang secara langsung tidak ada. Namun, hampir 80% cerita rakyat Madura berhubungan dengan budaya Jawa. Hal ini terjadi karena ada kekerabatan antara budaya Madura dan budaya Jawa.



**Isu-Isu Penting:**

1. Sastra mempunyai dinamika dan kehidupannya sendiri, bukan sekadar sebagai bahan penelitian bahasa. Sastra justru merupakan bentuk tertinggi ekspresi bahasa.
2. Rasa kepemilikan budaya perlu dipromosikan melalui gerakan budaya dengan aktor promosi adalah negara, pemerintah daerah, akademisi, budayawan, komunitas sastra, dan masyarakat.



## 8. Cerita-Cerita Pesugihan di Jawa: Pola Keekerabatan Sastra dan Paradoks Teks-Konteks

### CERITA-CERITA PESUGIHAN DI JAWA: POLA KEKERABATAN SASTRA DAN PARADOKS TEKS-KONTEKS

*The Pesugihan Stories in Java  
Pattern of Literary Kinship and Tex-Context Paradox*

**Mashuri**

Balai Bahasa Jawa Timur  
misterhuri@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian cerita-cerita pesugihan di Jawa ini menggunakan elaborasi teori tipe-motif, arkeo-genealogi pengetahuan, dan tafsir kebudayaan. Tujuannya untuk memperoleh pola kekerabatan cerita-cerita pesugihan yang berserak di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta dan paradoks teks-konteks seputar kesenjangan dan keretakan epistemologis dalam kesejarahan dan tafsir sosiokulturalnya. Metode analisis yang digunakan adalah metode perbandingan dan analisis diskursus. Hasilnya, dari rekonstruksi sembilan cerita pesugihan di Jawa dengan topografi wilayah berbeda, ditemukan empat tipe-motif yang menjadi penanda kekerabatan, meliputi berdasar benda (pohon), tabu/larangan (pernikahan terlarang), hewan yang luar biasa (kera jadi-jadian), dan tipe orang tertentu (perempuan sakti atau sakit hati). Cerita pesugihan juga menyimpan paradoks teks-konteks karena terdapat pemaknaan yang menyimpang dan bertolakbelakang antara cerita dengan konteks, yang meliputi peleburan sakral-profane, tarik-ulur orisinalitas dan politik ekonomi, dan kekaburan fakta-fiksi. Paradoks tersebut muncul setelah melewati proses panjang dalam dialektika waktu dan ruang, dengan residu yang menempatkan cerita pesugihan dalam lubang hitam dan kelam. Menguak sisi gelap pesugihan, dengan mengeliminasi prasangka adalah upaya mengenali sisi lain kondisi manusia Jawa dalam proses menjadi beradab.

**Kata-kata kunci:** cerita pesugihan, pola kekerabatan sastra, paradoks kebudayaan

#### **Abstract**

*The study of pesugihan stories in Java uses the elaboration of motive-type theory, archeology-genealogy of knowledge, and cultural interpretation. The objective is to obtain a pattern of kinship of scattered pesugihan stories in East Java, Central Java, and Yogyakarta and the paradox of text-context around the epistemological gaps and rifts in their historical and sociocultural interpretations. In this case used the method of comparison and discourse analysis. As a result, from the reconstruction of nine stories of pesugihan in Java with different topographic areas, four types of motives were identified, covering objects (trees), taboo/prohibition (forbidden marriages), extraordinary animals (apes) and a certain type of person (female sakti or hurt). The pesugihan story also holds the context-textual paradox, since there is a distorted and contrasting meaning between the story and the context, which includes sacral-profane fusion, the pulling of originality and economic politics, and fact-fictional blurring. The paradox arises after a long process in the dialectics of time and space, with the residue placing the*



*story of pesugihan in black and dark holes. Revealing the dark side of pesugihan, by eliminating prejudice is an attempt to recognize the other side of the Javanese human condition in the process of being civilized.*

**Keywords:** *pesugihan story, pattern of literary kinship, cultural paradox*

## **PENDAHULUAN**

Penelitian terhadap cerita-cerita pesugihan di Jawa termasuk langka keberadaannya. Hooykas (1929) menyinggung makhluk pesugihan sekilas dan tidak secara khusus karena terkait dengan legenda rakyat Jawa lain dalam khazanah seni rupa Jawa tradisional berupa lukisan kaca. Dalam bidang antropologi, sosiologi, sejarah, dan agama, pesugihan menjadi bahan kajian para sarjana di bidang tersebut. Hal tersebut ada sejak zaman kolonialisme Belanda, terutama tuyul dan Nyi Blorong, meskipun ada yang tidak menjadikannya bahan kajian utama, di antaranya, Harthoorn (1860), van Hien (1894), Kremeer (1904), Drewes (1929), Geertz (1983), Onghokham (2002), Pemberton (2003), dan Wessing (2006). Penelitian mendalam ihwal kesejarahan pesugihan dilakukan Boomgaard (1993), yang mengaitkannya dengan sejarah perekonomian di Jawa, mulai zaman keemasan kolonial, zaman depresi, hingga munculnya kapitalisme di Jawa. Terdapat beberapa penelitian mutakhir tentang pesugihan yang terfokus pada satu tempat dan dari sudut pandang antropologis dan sosiologis, seperti Roibin (2008) tentang mitos Pesugihan Gunung Kawi dalam tradisi keberagaman, Abdau (2013) terkait aspek sosiologis ritual Pesugihan Gunung Kemukus, Hadi (2016) tentang fenomena dan muatan pendidikan Pesugihan Gunung Kawi, dan Desianasari (2016) tentang makna sosial ritual Pesugihan Roro Kembang Sore di Tulungagung. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji cerita-cerita pesugihan Jawa di beberapa wilayah geografis dalam lingkup kebudayaan Jawa, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, dengan menelusuri pola kekerabatan dan paradoks antara teks cerita dengan konteks sosiokulturnya.

Dengan mempertimbangkan lokasi geografi, keunikan, dan unsur pembentuk cerita, penelitian ini mengkaji sembilan cerita pesugihan yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa dengan jangkauan demografi dan topografi berbeda. Di Jawa Timur, yaitu Pesugihan Gunung Kawi di Wonosari, Kepanjen, Malang; Pesugihan Makam Ngujang di Tulungagung; dan Pesugihan Roro Kembang Sore di Gunung Bolo, Tulungagung. Di Jawa Tengah, meliputi Pesugihan Gunung Kemukus di Gunung Sari, Pendem, Sumberlawang, Sragen; Pesugihan Pulau Seprapat di Desa Bendar, Juwana, Pati; Pesugihan Nyi Puspo Cempoko di Desa Kabongan, Rembang; Pesugihan Pohon Ketos di Desa Bero, Trucuk, Palar, Klaten; dan Pesugihan Dewi Lanjar, di Pantai Slamaran, Pekalongan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah Pesugihan Nyi Blorong di Sendang Pengilon, Desa Bangunjiwo, Bantul. Selain kesembilan tempat pesugihan tersebut, masih banyak tempat lain pesugihan di Jawa, seperti di Gunung Surowiti Gresik, di Alas Purwo Banyuwangi, di Sendang Jimbung Klaten, Sendang Alas Kucur di Paseban Bayat Klaten.

Cerita-cerita pesugihan di sembilan tempat tersebut sangat beragam dan tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari tiga golongan besar cerita rakyat *ala Bascom*, yaitu mite, legenda dan dongeng (Danandjaya, 1984: 64). Meski penggolongan Bascom sangat terbatas oleh beragam cerita pesugihan Jawa dan termasuk penggolongan ideal, tetapi bertumpu pada strategi penggolongan tersebut



masih tetap perlu meskipun nanti ada improvisasi dan eksplorasi tertentu terkait dengan keberadaan cerita pesugihan yang tidak sesuai dengan penggolongan Bascom tersebut. Misalnya, di beberapa tempat, terdapat kisah-kisah yang berbau legenda, tetapi ternyata sifatnya ke arah mite, yaitu disakralkan oleh pemilik cerita. Tentu hal itu sulit untuk mengikuti kategori Bascom. Untuk menghadapi kasus tersebut, jalan keluar yang dirumuskan Danandjaya (1984) menjadi relevan. Bila cerita pesugihan berada dalam ruang liminal antara legenda dan mite, strategi pemilahannya dengan mempertimbangkan ciri yang lebih dominan. Jika ciri mite lebih menonjol, cerita tersebut digolongkan mite. Namun, jika yang lebih berat adalah ciri legenda, cerita itu harus digolongkan legenda.

Relativitas tersebut berlaku karena di kalangan para ahli penggolongan legenda belum ada kesatuan pendapat. Brunvand (*via* Danandjaya, 1984) mengelompokkan legenda menjadi empat, yaitu legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perseorangan, dan legenda setempat (hlm.67). Danandjaya (1984) menyatakan yang termasuk legenda keagamaan adalah legenda orang-orang suci agama. Meskipun legenda itu sudah ditulis sebagai hagiografi dan disahkan oleh otoritas keagamaan tertentu, tetapi masih tetap sebagai folklor atau prosa rakyat karena ia masih hidup di kalangan rakyat sebagai tradisi lisan. Oleh karena itu, tidak salah jika disebut bahwa hagiografi merupakan transkripsi dari kehidupan orang-orang saleh (hlm. 67—68). Dalam cerita pesugihan, terdapat legenda orang saleh seputar tokoh yang jejak makamnya dianggap keramat atau punden. Danandjaya menyatakan (1984) adapun legenda alam gaib biasanya berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan pernah dialami seseorang. Fungsi legenda semacam ini untuk meneguhkan kebenaran takhayul atau kepercayaan rakyat (hlm. 71). Danandjaya (1984) menyatakan legenda perseorangan adalah cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu, yang dianggap oleh yang empunya cerita benar-benar pernah terjadi (hlm. 73). Kedua jenis legenda tersebut termasuk kisah tokoh yang menjadi sumber cerita pesugihan.

Cerita pesugihan memiliki unsur-unsur pembentuk cerita yang semotif antara satu tempat dan tempat lainnya meskipun lokasinya berjauhan sehingga memiliki potensi kekerabatan bila diperbandingkan dengan bertumpu pada kesamaan unsur tersebut. Oleh karenanya, ancangan penelitian ini untuk mengkonstruksi pola kekerabatan sastra sesuai dengan potensi sembilan cerita pesugihan tersebut. Hal itu karena untuk mendeskripsikan dan mendapatkan peta sastra yang utuh terkait cerita pesugihan dibutuhkan proses panjang karena ketersebaran cerita dan sisa-sisa yang dapat ditangkap sangat mungkin mengalami reduksi seiring dengan perjalanan waktu, apalagi lewat tradisi lisan.

Meski demikian, tak dapat disangkal, cerita pesugihan hidup lewat tradisi lisan. Pudentia (1998) menyatakan tradisi lisan diartikan segala wacana yang diucapkan meliputi yang lisan dan yang beraksara atau dikatakan juga sebagai sistem wacana yang bukan aksara (hlm. vii). Tradisi lisan memiliki nilai dan muatan yang sangat bermakna bagi komunitas masyarakat tertentu, dan menjadi penanda budaya kelompok masyarakat tertentu. Bahkan, Waiko dalam Djuweng (1998) menekankan bahwa wacana lisan merupakan landasan keasadaran diri dan otonomi sebuah suku bangsa ketika mereka berhubungan dengan dunia luar, dari yang verbal sampai yang nonverbal (hlm. 169). Lewat kesadaran itu, mereka menemukan kepercayaan diri yang pada gilirannya memainkan peranan penting dalam membentuk jati diri dan eksistensi. Hal senada diungkap Danandjaya (1984) bahwa



semua prosa rakyat memiliki beberapa fungsi sebagaimana yang telah diungkap Bascom, di antaranya, adalah sebagai sistem proyeksi bagi pemilik cerita, sebagai alat pengesahan pranata dan lembaga kebudayaan, alat pendidikan anak (pedagogi), sebagai alat kendali masyarakat, dan sebagai penghibur atau penglipur lara (hlm. 140—141).

Dengan klaim konseptual demikian, tentu relasi paradoksal mengiringi cerita pesugihan di Jawa karena entitas pesugihan telanjur dipersepsi kontradiktif dalam bangun kebudayaan Jawa. Dilihat dari sisi etimologis, Tim Balai Bahasa Yogyakarta (2011) menyatakan pesugihan merupakan sarana yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kaya, dapat berupa jimat dan sejenisnya (hlm. 683). Pemberton (2003) menjelaskan, pesugihan adalah sebuah ngelmu yang khas di tempat-tempat tertentu, ‘suatu sarana esoterik untuk menjadi kaya’. Tempat-tempat tertentu itu memberikan ruang untuk berhubungan dengan makhluk halus tertentu yang mampu mengubah menjadi binatang. Makhluk itu menjamin bagi mereka yang telah mengikat kontrak dengan mereka akan memperoleh imbalan kekayaan. Logika dari kontrak tersebut adalah pada suatu imbalan jasa, yang pada hakekatnya orang-orang tersebut menggadaikan jiwanya (hlm. 371). Tak heran, posisi pesugihan dalam alam kultur Jawa pun dipandang negatif, bahkan dianggap residu bagi konstruksi kebudayaan Jawa yang dipersepsi adiluhung meskipun religi orang Jawa memercayai kekuatan alam di luar diri manusia, termasuk makhluk halus dan roh (Kodiran, 1987; Koentjaraningrat, 1994), terutama orang Jawa Kejawen (Magnis-Suseno, 1993: 15). Realitas kultural itu memang kontradiktif karena dalam primbon tertentu dijelaskan makhluk-makhluk penghuni wilayah, bahkan ada mantra yang merujuk pada makhluk pesugihan untuk “laku” kelancaran rezeki (Soembogo, tt; Noeradyo, 1994: 37).

Hal yang sama juga ditangkap beberapa antropolog dan sejarawan dalam melihat pesugihan di Jawa, sebagaimana van Hien (1896) mencatat, karakter Blorong yang memberi kekayaan pada orang yang terikat kontrak dengannya dengan tebusan tertentu. Di sisi lain, Geertz (1983) mendefinisikan pesugihan sebagai memiliki tuyul. Memang pengertian yang terlalu sederhana, tetapi ia adalah salah seorang antropolog yang pertama kali menaruh perhatian pada fenomena tuyul meskipun ia juga menyebut *keblek*, pesugihan pencuri beras. Tuyul pun digolongkan sebagai makhluk halus yang karib dan manja, berbeda dengan makhluk halus lainnya (hlm. 26—28). Geertz (1983) mengategorikan makhluk halus di Jawa menjadi *memedi*, *lelembut* dan tuyul (hlm. 19). Bahkan, salah satu praktik pesugihan adalah menjadi babi hutan jadi-jadian, istilahnya *babi ngepet*. Geertz (1983) juga menggolongkan pesugihan sebagai semacam sihir (hlm. 370). Pemberton (2003) mencatat bahwa ada beberapa tempat untuk pesugihan di Jawa Tengah. Selain Bulus Sendang Jimbung di Klaten, terdapat jenis pesugihan harimau jadi-jadian di Setra Kombor Wonogiri, dan ditengarai sebagai praktik pesugihan paling populer (hlm. 371).

Yang perlu dicatat, ritual pesugihan di Jawa selalu bersandar pada sosok-sosok legenda, bahkan tokoh historis. Anehnya, di antara tokoh itu ada yang sama sekali tidak berhubungan dengan pesugihan. Beberapa di antaranya dipersepsi sebagai orang suci, bahkan wali (Roibin, 2008). Adapun cara mendapatkan pesugihan adalah cara melakukannya dengan ziarah kubur ke makam-makam tokoh tersebut pada hari tertentu dengan cara tertentu. Geertz (1983) mencatat bahwa ada informannya yang mendapatkan pesugihan di makam Sunan Giri di Gresik (hlm.





26) meskipun makam itu tidak dikenal sebagai pesugihan. Mungkin yang dimaksud adalah petilasan Sunan Kalijaga di Gunung Surowiti, Panceng, Gresik, yang menyimpan potensi sebagai lokasi mencari pesugihan.

Ihwal tokoh-tokoh suci, Chambert-Loir dan Guillot (2007) mengidentifikasi bahwa pelaku ziarah kubur biasanya berhubungan dengan persoalan kehidupan yang riil, dan betapa sulitnya untuk mencari kesinambungan antara ziarah kubur yang intinya adalah berkirim doa dengan maksud-maksud tertentu yang berbau profan. Namun, Chambert-Loir dan Guillot (2007) mendapatkan sebuah ‘konklusi’ reflektif bahwa ada semacam keyakinan Tuhan begitu Mahabesar sehingga terlalu akbar menjangkau persoalan hidup mereka sehari-hari (hlm. 270). Meski demikian, Harris (2009) mencatat bahwa ziarah kubur di Jawa mengandung banyak hal, mulai dari legitimasi politik, ketersebaran sejarah lokal, hingga pembentukan identitas. Dalam konteks ziarah kubur, pesugihan digolongkan dalam ritual *ngalab berkah* dengan tujuan khusus mendapatkan kekayaan, dengan rincian sebagaimana yang diulas Pemberton (2003). Namun, penelitian ini tidak berpretensi memperuncing persoalan ziarah kubur dari sudut pandang teologi, apalagi ziarah yang terkait dengan maksud-maksud pesugihan, yang tentu saja dianggap sebagai bentuk penyimpangan oleh publik.

Meski posisi pesugihan subordinat dalam bangun kebudayaan Jawa, tetapi terdapat cukup banyak tempat pesugihan di Jawa, mulai dari pesisir hingga pedalaman, mulai dari latar kultur santri, kejawen hingga abangan. Di tempat-tempat tersebut beredar cerita rakyat yang khas, tetapi jarang yang didokumentasikan sebagaimana kumpulan cerita rakyat pada umumnya. Dimungkinkan stigma negatif terhadap pesugihan menjadi faktor penghambat dokumentasi cerita tersebut meskipun cerita pesugihan itu seputar orang-orang keramat, bahkan dianggap wali di kalangan masyarakat seperti yang sudah disinggung. Ada beberapa cerita yang sengaja dibukukan dan menjadi panduan peziarah lokal, tetapi jauh dari persoalan pesugihan. Namun, ada pula cerita yang masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat, dan di antaranya terkait dengan pesugihan.

Beberapa cerita sudah dimodifikasi untuk menyantuni keseimbangan dan keselarasan dan sengaja dikonstruksi untuk meminimalkan paradoks. Dengan kata lain, beberapa tradisi tutur yang menjadi rumah bagi cerita pesugihan sudah mengalami banyak perubahan, seiring dengan kondisi zaman dan perkembangan kognitif masyarakat, apalagi yang terkait dengan kepercayaan pada magi dan supranatural. Subagya (1981) menjelaskan, keyakinan pada makhluk halus di kalangan masyarakat sedikit demi sedikit menyusut, bahkan luntur, seiring dengan perluasan pendidikan modern, meski di antara kaum abangan kepercayaan itu masih dipelihara dan awet (hlm. 77). Pemberton (2003) juga menengarai bahwa peminat pesugihan sudah tidak lagi marak terdengar di Jawa Tengah (hlm. 371). Kini, beberapa tempat memang sudah menjadi situs makam yang lebih bersifat Islami, seperti di makam Eyang Djoego dan R. Iman Soedjono di Gunung Kawi (Roibin, 2008). Meski demikian, di beberapa tempat, pelaku ritual pesugihan masih tetap ada peminatnya (Roibin, 2008; Abdau, 2013; Hadi, 2016; Desianasari, 2016). Namun, di tempat lain sudah jarang ditemukan, bahkan pengamal pesugihan ditengarai sudah punah, seperti di Pulau Seprapat.

Meski demikian, ciri khas dan motif utama cerita-cerita pesugihan tidak terhapus sama sekali dari ingatan kolektif masyarakat. Meski mengalami degradasi,



modifikasi, dan adaptasi terhadap berbagai kepentingan. Beberapa cerita sudah diinventarisasi dan didokumentasikan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, data yang digunakan tidak hanya data lisan semata, tetapi juga data tertulis hasil dokumentasi atau penulisan ulang dengan mempertimbangkan kualitas dan kesempurnaan cerita yang dapat dirunut pada motif dan kekerabatannya. Tentu saja, untuk menuju ke analisis yang lebih komprehensif dilakukan rekonstruksi cerita terlebih dulu karena sebagaimana yang sudah disinggung, beberapa cerita sudah mengalami penafsiran ulang, terutama yang terkait dengan moralitas, agama, bahkan budaya pasar.

Dengan melihat potensi dan realitas cerita pesugihan Jawa, baik dalam lokal geografi Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Yogyakarta, dirumuskan dua masalah penelitian, yaitu bagaimanakah pola kekerabatan cerita pesugihan di Jawa dan bagaimanakah paradoks yang melingkupi cerita pesugihan tersebut berdasarkan kondisi sosiokulturalnya. Untuk mengurai dua permasalahan tersebut, dibutuhkan pemilahan cerita pesugihan berdasar jenis dan motif guna mendesain peta kekerabatannya. Dalam hal ini digunakan pendekatan yang tidak sekadar menggunakan kesamaan motif sebagai pembenar jaringan kekerabatannya, tetapi mengkaji orisinalitas dan kekhususan cerita rakyat bersangkutan sebagai lokal genius masyarakat setempat. Hal itu merupakan khazanah yang unik dan khas, apalagi tiap-tiap cerita memiliki paradoks teks-konteks tersendiri dalam kesejarahannya terkait retakan, dialektika ruang-waktu, dan bias tafsir dalam konstruksi sosiokulturalnya.

## LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan elaborasi tiga teori. Untuk penelusuran pola kekerabatan menggunakan motif cerita berdasar teori tipe-motif Aarne-Thomson. Sementara itu, untuk mengungkap paradoks teks-konteks digunakan teori arkeo-genealogi pengetahuan Foucault dan tafsir kebudayaan Geertz. Ketiga teori tersebut disenyawakan untuk mengungkap pola kekerabatan dan paradoks teks-konteks cerita-cerita pesugihan.

Pendekatan tipe-motif digunakan untuk membedah kesamaan motif antar cerita pesugihan yang diteliti sehingga memunculkan pola kekerabatan. Yang dimaksud dengan motif adalah unsur-unsur suatu cerita. Motif teksnya adalah unsur cerita itu yang menonjol dan tidak biasa sifatnya (Danandjaya, 1984; Taum, 2011). Motif dibagi menjadi enam, yaitu motif berupa benda, motif berupa hewan luar biasa, suatu konsep, suatu perbuatan, penipuan terhadap suatu tokoh, tipe orang tertentu, atau sifat struktur tertentu (Danandjaya, 1984; Taum, 2011:88—90). Tipe-motif dalam penelitian ini termasuk ke dalam poligenesis atau *parallel invention*. Artinya, unsur-unsur keunikan dan kekhasan cerita rakyat dari kawasan penelitian dipandang sejajar dengan cerita-cerita rakyat bermotif sama.

Sementara itu, potensi cerita pesugihan sangat tepat didekati dengan metode Foucauldian, baik dari sisi marginalnya, relasi kekuasaan, diskursus, serta aspek-aspek arsip dan diskontinuitas sejarahnya yang menyaran pada kecenderungan arkeologis dan genealogis. Apalagi, arkeologi pengetahuan merupakan metode tepat untuk menganalisis diskursus lokal (Barker, 2014: 11). Adapun genealogi pengetahuan digunakan untuk meneliti relasi kekuasaan, serta kesinambungan dan patahan diskursus yang bermain dalam kondisi-kondisi kesejarahan tertentu (Barker, 2014: 106). Hal itu karena konsep kesejarahan Foucault adalah



diskontinuitas. Kendati genealogi mengkritisi sejarah, tidak berarti genealogi adalah oposan sejarah. Pasalnya, meski genealogi menolak metahistoris yang menyebarkan pentingnya idealisme tanpa mendefinisikan secara teleologis, genealogi tetap membutuhkan sejarah untuk menghalau tirai penutup keaslian objek sejarah dengan mengetahui secara jelas segala peristiwa dalam sejarah. Bahkan Foucault (2009) sempat mengatakan: “genealogi adalah sejarah dalam bentuk konser karnaval” (hlm. 277).

Teori tafsir kebudayaan Geertz digunakan untuk lebih memperhatikan makna daripada sekadar perilaku manusiawi. Geertz (1992) beranggapan kebudayaan adalah hal yang semiotik dan kontekstual. Tafsirannya adalah dengan memaparkan konfigurasi dan sistem-sistem simbol yang bermakna secara mendalam dan menyeluruh. Simbol budaya adalah kendaraan pembawa makna. Menurutnya, selama ini sistem simbol yang tersedia di kehidupan masyarakat menunjukkan bagaimana masyarakat bersangkutan melihat, merasa, dan berpikir tentang dunia mereka dan bertindak berdasar pada nilai-nilai yang sesuai dan selaras (hlm. 17—19). Geertz (1992) juga menyiratkan adanya dualitas dalam kerja tafsir kebudayaan di lapangan, yaitu apakah peneliti menggunakan kaca mata ilmiah atau peneliti menggunakan mata kepala masyarakat. Dalam sebuah penelitian memang seyogyanya memadukan unsur emik dan etik. Dalam penelitian ini, mengarah ke metode tersebut. Dengan menganggap bahwa cerita dan historisitas di baliknya adalah data-data kebudayaan dan berupa simbol-simbol yang perlu ditafsirkan untuk dicari makna terdalamnya (hlm. 17—19).

## **METODE PENELITIAN**

Langkah penelitian ini dimulai dari mendata sebagian cerita pesugihan dalam tradisi lisan, kemudian dimodel pengarsipan. Sebagian lain diambil dari berbagai sumber, yang ditunjang bahan pustaka, berupa buku-buku, hasil inventarisasi, babad, brosur, berita, dan tulisan lain dalam berbagai media. Data-data tersebut dikumpulkan, diverifikasi, diklasifikasi dalam kadar perbedaan dan persamaannya. Selanjutnya, dilakukan rekonstruksi cerita, lalu diperbandingkan berdasarkan kesamaan tipe-motif untuk mengetahui pola kekerabatan di antara cerita. Selanjutnya, dianalisis dengan menggunakan diskursus, arkeologi, dan genealogi. Hal ini merujuk pada langkah metodologis yang perlu dilakukan bagi analisis diskursus yang merupakan implikasi dari penggunaan perangkat teoretis Foucault, yang meliputi tahap pemecahan struktur wacana dan kritik ideologi-kesejarahan --dari arkeologi menuju genealogi pengetahuan (Faruk, 2008: 78). Antara proses kajian arkeologi dan genealogi tidak berbeda satu sama lain dalam kajiannya karena saling melengkapi. Arkeologi memfokuskan pada kondisi historis yang ada, sedangkan genealogi lebih mempermasalahakan tentang proses historis (Ritzer, 2003: 67). Dalam analisis, paradigma tafsir kebudayaan digunakan untuk mendekati fakta kebudayaan yang dipenuhi dengan sistem pengetahuan dan simbol kultural.

## **REKONSTRUKSI CERITA**

Geertz (1983) melihat laku *ngelmu* pesugihan sama dengan sihir, tenung, atau santet (hlm. 370). Pemberton (2003) juga melihat bahwa ritual pesugihan terlalu individualis dan bersifat kontrak, yang berbeda dengan *ngelmu* pencuri dan dalang karena pesugihan digunakan untuk kepentingan sendiri, memperoleh kekayaan



demi kekayaan dengan menukarkan jiwanya dengan uang (hlm. 372). Hal yang sama juga dijabarkan oleh beberapa paranormal atau parapsikologi terkait dengan *ngelmu* dan pesugihan, yang dianggap sebagai bentuk kejahatan atau laku kotor untuk mendapatkan kekayaan karena merugikan orang lain, dan diri pelakunya (wawancara dilakukan dalam rentang 2010—2017).

Beberapa paranormal atau parapsikolog menjelaskan, apapun bentuk pesugihannya, selalu minta tumbal bagi pemiliknya (wawancara Ki Karebet, ahli primbon, guru besar Padepokan Sandi Cakra, Lawang, Malang, berlatar kultur Islam-Kejawen), baik itu tumbal berupa nyawa sendiri, anak-isteri sendiri, maupun anggota keluarga lainnya. Bahkan, ada yang mengatakan, efek pesugihan terkait erat dengan kehidupan anak-cucu sampai tujuh turunan karena yang diambil oleh pesugihan adalah rezeki anak-cucu (wawancara Agus Misbahul Munir, ahli *khadam*, pengasuh Perguruan Amanat Suci, di Tropodo Waru Sidoarjo, berlatar santri). Oleh karena itu, pesugihan dianggap sebagai sebuah kejahatan yang melibatkan kekuatan supranatural (wawancara Gus Becki, *ghost-buster*, ketua Padepokan Lillaah, Krukah Selatan, Surabaya, berlatar metropolis) karena dilakukan dengan cara mencuri hak milik orang, serta menjual jiwa dengan kekuatan gaib hitam dan menempuh jalan sesat untuk kepentingan sesaat. Menurutnya, ‘akibat pesugihan sangat kejam, apalagi melibatkan Blorong dan pasukannya karena jenis ini tidak pernah memberi batas toleransi bagi pemiliknya’. Meski ada pemakluman tertentu kepada pemilik pesugihan karena ada yang menempuh jalan pesugihan itu karena kondisi darurat, dan bukan semata-mata lemah iman (wawancara Suhu Ong, ahli shio dan feng shui, dan pernah menjadi ketua IPSI—Ikatan Paranormal Seluruh Indonesia), tetapi pengorbanan yang ditempuh terlalu besar dan tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan karena ranah pesugihan itu berisiko tinggi.

Antropolog, sejarawan, dan parapsikolog, semakin mempertegas dan mengukuhkan persepsi minor di kalangan masyarakat luas terhadap pesugihan. Dampaknya, cerita-cerita sekitar pesugihan tidak menduduki cerita utama yang menampung ingatan kolektif, yang dianggap sarat dengan cermin didaktis dan keteladanan. Bahkan, dari beberapa cerita pesugihan di Jawa, hanya diperoleh dua cerita yang ditulis untuk konsumsi publik, terutama untuk anak-anak dan remaja dan usai paparan cerita diberi kesimpulan. Namun, cerita tersebut sudah dideformasi dan dikaitkan dengan tokoh lain atau asal kejadian tempat. Misalnya, cerita Pesugihan Roro Kembang Sore, bertajuk “Tewasnya Pangeran Lembu Peteng” (Santosa, 2003: 17—22) yang merujuk pada asal-usul Sungai Lembu Peteng, dan Pesugihan Gunung Kemukus, dengan judul “Pangeran Samudra, Putra Prabu Brawijaya”, yang merujuk pada perjuangan Pangeran Samudro sebagai putra Prabu Brawijaya dalam membantu saudaranya Raden Patah membangun Kerajaan Demak Bintara dan asal-usul penamaan gunung tempat Pangeran Samudra dimakamkan, yaitu Gunung Kemukus (Tim Pustaka Setia, 2006).

Versi lisan juga demikian. Beberapa cerita pesugihan sudah mengalami modifikasi seiring dengan tuntutan moralitas dan nilai agama, terutama untuk cerita yang dianggap pra-Islam dan melanggar tabu masyarakat. Salah satunya cerita “Pesugihan Gunung Kemukus”. Pada tahun 2005, masih marak cerita bahwa hubungan antara Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan adalah hubungan cinta terlarang antara anak dan ibu tiri. Namun, dalam perkembangan mutakhir, terdapat versi cerita bahwa cinta keduanya bukan cinta terlarang, tetapi cinta antara anak



dan orang tua, tanpa asmara, apalagi inses. Bahkan, ritual pesugihan dianggap tidak ada di Gunung Kemukus dan hanya dianggap sebagai sebuah sesat pikir akibat salah tafsir pada mitos, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat, terutama ekonomi kelompok masyarakat tertentu (Tempo.co, 21 November 2014).

Dengan adanya perkembangan cerita, dalam berbagai kepentingan, tentu perlu dilakukan rekonstruksi. Dasar yang dijadikan rekonstruksi adalah dominasi unsur tertentu dalam beberapa versi, keutuhan cerita, dan versi cerita yang dimiliki masyarakat luas. Pertimbangannya, sekali lagi, bukan pada kebenaran sejarah, tetapi pada otentisitas cerita. Pasalnya, beberapa pusat cerita pesugihan ini adalah tokoh historis, yang dalam penafsiran cerita pesugihannya lebih ke arah fiksi meskipun beberapa di antaranya lekat dengan fakta historis, seperti nama tokoh historis lain, nama geografi, dan kerajaan. Ihwal kesenjangan tersebut, akan dibahas dalam subbab tersendiri terkait dengan paradoks teks-konteks. Rekonstruksi sembilan cerita berupa sinopsis dan sudah memenuhi unsur-unsur pembentuk cerita. Ada yang terdiri atas dua versi, yaitu Pesugihan Gunung Kemukus, Pesugihan Roro Kembang Sore, Pesugihan Pulau Seprapat, dan Pesugihan Nyi Blorong. Namun, dalam kesempatan ini, rekonstruksi tersebut tidak dapat ditampilkan secara utuh karena keterbatasan halaman. Lihat Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Rekonstruksi Sembilan Cerita Pesugihan di Jawa**

No.	Cerita Pesugihan	Lokasi	Sumber	Keterangan
1	Gunung Kawi	Malang	Solikin (putra Juru Kunci), <i>Memo Malang</i> , dan Roibin (2008)	Satu versi. Terkait tokoh Eyang Djoego dan Eyang R Iman Soedjono yang menanam pohon Dewandaru.
2	Gunung Kemukus	Sragen	Juru Kunci Muhammad Widanto, <i>Memorandum</i> , dan <i>Cerita Rakyat Jawa Tengah</i> (2006)	Dua versi. Versi pertama, terkait hubungan antara Pangeran Samudro-Dewi Ontrowulan sebagai anak dan ibu tiri. Versi kedua, hubungan Pangeran Samudro-Dewi Ontrowulan sebagai anak dan ibu kandung.
3	Nyi Blorong	Bantul	<i>Serat Centini</i> , <i>Serat Kandaning Ringgit Purwa</i> , informan	Dua versi berbeda. Versi pertama terkait dengan Ratu Kidul. Versi kedua sebagai tokoh historis cucu raja Sunda.
4	Pohon Ketos	Klaten	Juru Kunci Mbak Kardikem, <i>Tata Tjara Pesogihan di Mbero Troetjoek</i> , <i>Memo</i>	Satu versi. Mbah Bandho muksa, lalu tumbuh pohon Ketos.
5	Roro Kembang Sore	Tulungagung	informan, <i>Babad Tulungagung</i> , <i>Cerita Rakyat Tulungagung</i> (2003)	Dua versi. Versi pertama terkait dengan cinta terlarang Roro Kembang Sore dan Pangeran Lembu Peteng (asal-usul Sungai Lembu Peteng). Kedua, terkait dengan Roro Kembang Sore dengan Joko Budeg (asal-usul Gunung Budeg).

No.	Cerita Pesugihan	Lokasi	Sumber	Keterangan
6	Makam Ngujangan	Tulungagung	Juru Kunci Ribus Katenan, <i>Babad Tulungagung</i> , dan <i>Memo X Tulungagung</i>	Satu versi. Sepasang santri yang disabda oleh Sunan Kalijaga menjadi kera.
7	Pulau Seprapat	Pati	Juru Kunci Mbah Salimin, <i>Tribunwisata</i> , <i>Merdeka</i> , dan <i>Wikipedia</i>	Dua versi. Versi pertama terkait dengan pangeran tanpa nama sebagai muasal kera jadi-jadian. Versi kedua terkait dengan tokoh Datuk Lodang.
8	Dewi Lanjar	Pekalongan	Informan, wikipedia	Satu versi. Kisah janda penguasa pantai utara Jawa, anak buah Ratu Kidul.
9	Nyi Puspo Cempoko	Rembang	Informan, Merdeka	Satu versi. Kisah perempuan yang bertapa setelah melarikan diri dari kawin paksa.

## POLA KEKERABATAN

Pola kekerabatan kesembilan cerita pesugihan Jawa dikelompokkan berdasarkan kesamaan motif, yang telah diperikan menjadi enam macam (Danandjaya, 1984; Taum, 2011: 88—90), menghasilkan klasifikasi tipe-motif empat jenis, yaitu berdasar motif benda (Pesugihan Gunung Kawi dan Pesugihan Pohon Ketos), berdasar tabu/larangan (Pesugihan Roro Kembang Sore dan Pesugihan Gunung Kemukus), berdasar hewan luar biasa (Pesugihan makam Ngujangan dan Pulau Seprapat), dan berdasar tipe orang tertentu (Pesugihan Nyi Blorong, Pesugihan Dewi Lanjar, dan Pesugihan Nyi Puspo Cempoko).

### Berdasar Motif Benda

Cerita seputar “Pesugihan Gunung Kawi” berbeda dengan “Pesugihan Pohon Ketos”, yang dianggap sebagai pusat kerajaan tuyul. Meski demikian, ditemukan pola kekerabatan cerita pesugihan yang berbeda tersebut. Aspek limitasinya terdapat pada keberadaan benda sejenis yang sangat penting dalam pola alur cerita, yang dianggap sebagai sarana berkomunikasi antara peziarah dengan tokoh yang dikeramatkan di sana yang akan dibahas lebih jauh dalam paradoks teks-konteks, yaitu keberadaan sebuah pohon. Bila di Gunung Kawi adalah Dewandaru, sedangkan di Bero adalah Ketos.

Dewandaru memiliki jejak panjang sebagai pohon mitos dalam alam kepercayaan Jawa. Tumbuhan yang bernama Latin atau nama ilmiah *Eugenia uniflora L.*, yang mempunyai beberapa sinonim di antaranya *Eugenia michelii Lam.*, *Eugenia oblongifolia*, *Eugenia zeylanica Willd* dikenal oleh khalayak sebagai cerme belanda, belimbing belanda, asam selong, atau cereme asam. Secara etimologi, Dewandaru berarti pembawa anugerah Tuhan. Dalam alam keyakinan Jawa, pohon ini adalah satu di antara sekian pohon yang dianggap suci dalam dunia pewayangan. Dalam jagat wayang purwa, Dewandaru adalah sebuah pohon sakti dan keramat yang tumbuh di kayangan. Dalam beberapa lakon wayang dijelaskan, raja yang memiliki pohon Dewandaru bakal menjadi raja agung karena kerajaannya akan berkembang menjadi sebuah negeri yang makmur, sentosa dan *gemah ripah loh jinawi*. Dewa yang bertugas merawat dan memeliharanya di Kayangan adalah Batara Kamajaya. Bahkan, pohon tersebut pernah menjadi syarat pinangan Arjuna kepada Dewi Wara Subadra, adik Kreshna dan Baladewa. Batara Kamajaya



meminjamkan pohon tersebut pada anak ketiga Pandudewanata tersebut sehingga Arjuna dapat menikah dengan Dewi Wara Subadra (Tim Penulis Sena Wangi, 1999: 445)

Sementara itu, pohon Ketos, yang menurut juru kunci Mbah Kardikem, sebagai satu-satunya pohon jenis tersebut di Klaten dan berusia 500 tahun. Pohon tersebut memang termasuk spesies tanaman langka, tentu bukan dari ketuaannya, tapi karena tidak ditemukan pohon Ketos lain di tempat berbeda. Tengara juru kunci tersebut tidak hanya terjadi di Klaten, bahkan juga di dunia karena nama Latin atau nama ilmiah Ketos itu sulit dicari, bahkan kemungkinan besar belum dirumuskan. Meski demikian, nama Ketos sangat masyhur di Jawa meskipun namanya tidak dapat ditemukan di kamus Jawa Kuno maupun Jawa Baru. Ketos sudah menjadi nama sebuah desa di Kecamatan Paranggupito Wonogiri Jawa Tengah, dan di Kecamatan Kibin, Serang, Banten, yang menunjukkan sebuah kecenderungan penamaan nama-nama desa di Jawa, bahkan di Indonesia, berdasarkan nama tumbuhan. Dalam kaitannya dengan alur dan motif cerita, tentu sangat sulit dicari dasarnya kenapa jelmaan Mbah Bandho adalah pohon Ketos, yang secara makna sangat berbeda dengan posisi Dewandaru dalam Pesugihan Gunung Kawi, yang terkesan simbolis dan mitologis meskipun dapat diasumsikan bahwa pada masa 500 tahun lalu, Ketos adalah sebuah pohon pilihan dan terkandung dalam dirinya unsur-unsur simbolis dan mitologis.

Di sisi lain, relasi antara tokoh dengan benda tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Pohon Ketos dan Mbah Bandho sebagai tokoh utama memiliki relasi secara substansial karena pohon tersebut ada ketika Mbah Bandho tiada. Apalagi disebutkan pohon tersebut sebagai jelmaan Mbah Bandho yang moksa, dan itu merupakan penanda peralihan bentuk dengan subjek yang berganti ruang. Dalam keyakinan pra-Islam di Jawa, yang terpengaruh oleh religi Hindu-Budha, memang dikenal adanya jelmaan, sebagai bentuk teknis dari konsep *nitis* dan reinkarnasi. Bahkan, keyakinan pada benda-benda tertentu, terutama pohon besar, berkekuatan adikodrati dikenal sebagai keyakinan lama di Jawa (Subagya, 1981). Sementara itu, Dewandaru ditanam R.M. Iman Soedjono, bukan tokoh utama, tetapi sebagai pengganti tokoh utama, sebagai penanda beralihnya waktu dalam ruang yang sama, dalam alam sama. Relasi yang terbangun adalah relasi imanensi. Pengaruh sinkretisme Islam-Jawa sangat kental dengan manifestasi konsep harmonisasi alam, sebagai wujud keseimbangan antara mikro-makrokosmos, dan pohon menjadi sarana komunikasi –sesuai dengan namanya Dewandawu. Dimungkinkan penanaman itu sebagai semacam inisiasi atau doa terkait dengan perkampungan baru agar dilimpahi dengan anugerah Tuhan.

Titik temu di antara keduanya adalah pada modus representasi tokoh. Mbah Bandho merepresentasikan dirinya dalam wujud baru sebagai simbol eksistensi, sedangkan Eyang Iman Soedjono menjadikan pohon sebagai representasi simbolik dalam relasinya antara alam dan manusia. Di sisi lain, di antara kedua cerita tersebut juga terdapat pola kekerabatan dalam kerangka liminitas lainnya, terkait unsur pembentuk cerita, yaitu tokoh utama antara Mbah Bandho dan Eyang Djoego. Keduanya merupakan pelarian, terkait dengan cucu seorang tokoh yang dikenali, dan yang ketiga bahwa mereka berusaha menyamarkan dirinya untuk tidak dikenali asal dan jati dirinya. Meskipun, Mbah Bandho dianggap sebagai legenda, dan Eyang Djoego sebagai sosok historis.



### **Berdasar Motif Tabu atau Larangan**

Untung saja makam Siti Nurbaya ada di Gunung Padang, Sumatra Barat sehingga muncul sebuah novel legendaris dari tangan Marah Rusli. Pasalnya, bila makam Sitti Nurbaya di gunung atau bukit di Jawa, dengan label cinta tak sampainya, dimungkinkan ia bakal menjadi objek pemujaan yang mengarah pada pesugihan. Bisa jadi, pernyataan tersebut berbau karikatural, tetapi jauh hari Teeuw (dalam Jamil, 1987), pernah menyitir perbedaan mentalitas orang Melayu dan Jawa dalam mempersepsi dunia. Orang Jawa lebih cenderung bersifat mitis, sedangkan orang Melayu cenderung rasional. Kira-kira begitulah nasib yang dialami Roro Kembang Sore-Pangeran Lembu Peteng dan Pangeran Samudera-Dewi Ontrowulan. Kisah kasih tak sampai mereka menerbitkan sebuah ritus pemujaan yang mengarah pada pesugihan.

Kekerabatan cerita Pesugihan Roro Kembang Sore dan Pesugihan Gunung Kemukus pun seputar cinta sejati tapi tak sampai yang berdasar motif tabu atau larangan. Tentu dalam hal ini berdasar cerita Pesugihan Gunung Kemukus (versi 1), yang menyatakan, Dewi Ontrowulan adalah ibu tiri Pangeran Samodra. Sebagaimana diketahui, Roro Kembang Sore dilarang untuk bersatu dengan pujaan hatinya, Pangeran Lembu Peteng. Ketika Lembu Peteng mati di tangan ayah Roro Kembang Sore, ia melarikan diri dan bertapa di puncak Gunung Bolo hingga ajal menjemput. Begitu pula dengan Dewi Ontrowulan, yang dilarang atau tabu bersatu dengan anak tirinya, pun pergi dari istana kerajaan. Begitu tahu bahwa sang pujaan hati sudah mati, ia pun menginginkan mati dalam satu liang lahat.

Keduanya memiliki eksese fatalis yang mirip. Roro Kembang Sore melakukan bunuh diri esensial. Meski secara ragawi ia masih hidup, tetapi jiwanya telah pupus. Ia bertapa dalam rangka menghadirkan *tanatos* dalam relung *eros*-nya yang telah meninggalkan dirinya. Ia menebusnya dalam perjalanan waktu yang menubuh. Adapun Dewi Ontrowulan melakukan bunuh diri eksistensial. Begitu *eros*-nya rampung, ia ingin merengkuh *tanatos*-nya secara menyeluruh sehingga ia pun berhasrat bersatu dalam alam lain bersama sumber *eros*-nya. Kedua tokoh berdasarkan pada romantisme platonik meskipun dengan cara penyikapan berbeda. Persamaan lainnya adalah peran orang tua yang menjadi pemisah jalinan cinta. Roro Kembang Sore oleh orang tuanya Adipati Bedalem karena calonnya adalah musuh. Adapun Pangeran Samudro adalah orang tuanya Raja Majapahit karena yang dicintainya adalah ibu tirinya. Dengan kata lain, Roro Kembang Sore-Pangeran Lembu Peteng merupakan cinta dilarang, sedangkan Dewi Ontrowulan-Pangeran Samudro adalah cinta terlarang.

### **Berdasar Motif Hewan yang Luar Biasa**

Cerita pesugihan di beberapa tempat selalu dikaitkan dengan hewan luar biasa karena dalam *ngelmu* pesugihan selalu mengadopsi kekuatan hewan. Geertz (1983) mencatat ada babi hutan atau *babi ngepet*, *ama menthek*, dan *kebleg*. Pemberton (2003) mencatat ada dua jenis hewan yang terlibat yaitu bulus di pesugihan Bulus Jimbung Klaten, dan harimau jadi-jadian di Setra Kombor Wonogiri. Sementara itu, dalam khazanah pesugihan lain, binatang juga menjadi modus operandinya, semisal ular untuk Nyi Blorong, dan kuda untuk Pesugihan Jaran Panoleh. Adapun untuk Pesugihan Makam Ngujang dan Pesugihan Pulau Seprapat adalah hewan berwujud kera. Oleh karenanya, keduanya berkerabat dalam cerita pesugihannya dengan persamaan motif hewan yang luar biasa.





Kera dalam dunia mitologi Jawa menempati posisi istimewa. Begitu pula dengan Sunda karena dalam khazanah Sunda dikenal dengan cerita rakyat “Lutung Kasarung”, makhluk yang dikutuk menjadi buruk dan menjalani karmanya, tetapi akhirnya berubah menjadi seorang lelaki tampan dan menjadi suami ratu cantik (Pudentia, 1992). Dalam dunia wayang lakon Ramayana, dapat dilihat posisi kera sebagai hewan yang luar biasa. Selain kesatria kera putih Anoman, putra Dewi Anjani, terdapat dua kera legendaris lainnya, yang merupakan saudara Dewi Anjani, yaitu Sugriwa dan Subali. Bahkan, para kera itu tidak hanya sosoknya yang menjadi sumber rujukan tentang makhluk luar biasa, tetapi kekuatan dan kesaktian mereka telah mewariskan jenis kesaktian di Jawa, termasuk adanya Aji Brajamusti, Brajalamatan, Brajadenta dan lain-lainnya, yang dalam beberapa primbon dianggap sebagai ilmu kadigdayan Jawa adiluhung (Trunarimong dan Indrajati, 1966: 42; Noeradyo, 1994: 33). Kesaktian-kesaktian itulah yang dimiliki Sugriwa dan Subali, terlebih Anoman, yang dikenal berusia panjang dan memiliki segudang kelebihan, seperti *Aji Sepi Angin* dan dapat kalis dari sambaran api (Tim Penulis Sena Wangi, 1999: 107).

Posisi kera dalam wayang purwa tersebut dalam proses menjadinya mirip dengan cerita “Pesugihan Makam Ngujang” dan “Pesugihan Pulau Seprapat” (versi 1) meskipun dalam hasilnya dipersepsi berbeda. Dari sudut pandang viktimologi, posisi kera di kedua pesugihan tersebut adalah korban. Kera dalam cerita “Pesugihan Makam Ngujang” adalah korban kutukan Sunan Kalijaga, sedangkan kera dalam “Pesugihan Pulau Seprapat” adalah korban kecerobohan pangeran tanpa nama dengan pusaka ajaibnya. Ihwal kutukan tersebut mirip dengan sebuah lakon wayang yang berpusar pada Cupu Manik Astagina, yang merupakan asal-usul perubahan wujud anak-anak Resi Gautama, yaitu Subali, Sugriwa dan Dewi Anjani, menjadi kera. Karena berebut Cupu Manik Astagina, ketiganya mencelupkan diri ke Telaga Mandirda. Sugriwa dan Subali menenggelamkan diri sehingga sejujur tubuhnya menjadi kera, sedangkan Dewi Anjani hanya mencuci tangan dan wajah. Ketiganya dikutuk ‘buruk rupa’ dan harus melakukan serangkaian tapa untuk menebus karmanya (Tim Penulis Sena Wangi, 1999: 102—105).

Di sisi berbeda, cerita di “Pesugihan Makam Ngujang” diyakini berkumpar pada petilasan Sunan Kalijaga berpola sama dengan cerita legenda “Situs Taman Kera” dan “Petilasan Sunan Kalijaga”, di Kelurahan Kalijaga, Harjamukti, Kota Cirebon. Juru kunci petilasan Raden Edi menjelaskan bahwa masyarakat setempat meyakini kera ekor panjang di situs tersebut adalah santri Sunan Kalijaga yang dikutuk. Pola kutukan dan sebab-musababnya sama dengan cerita “Pesugihan Makam Ngujang” meskipun di Cirebon tidak berujung pada pesugihan. Yang unik, terdapat petilasan Sunan Kalijaga di Gunung Surowiti, Gresik, yang menjadi tempat pesugihan meskipun tidak ada santri yang dikutuk menjadi kera.

### **Berdasar Motif Tipe Orang Tertentu**

Kekerabatan cerita “Pesugihan Nyi Blorong”, “Pesugihan Dewi Lanjar”, dan “Pesugihan Nyi Puspo Cempoko” terletak pada motif tipikal mereka sebagai perempuan yang tersakiti dan terbuang. Hal ini ada dalam cerita “Pesugihan Nyi Blorong” versi 2 karena “Pesugihan Nyi Blorong” versi 1 yang bersumber dari khazanah Jawa lama menggambarkan tokoh Nyi Blorong sebagai perempuan digdaya. Bila diteruskan pada cerita seputar cara mendapatkan pesugihannya yang dipersepsi publik, akan terurai sebuah motif lain, yang juga sama di antara



ketiganya, yaitu sebagai perempuan haus seks. Peralnya, pelaku pesugihan yang menggunakan jasa mereka selalu dimintai imbalan dalam soal ranjang. Namun, untuk soal ranjang, menyimpan sebuah paradoks tersendiri, sebagaimana kelanjutan cerita ketiga sosok tersebut sebagai perempuan yang pernah mengalami diskriminasi gender.

Perbedaan ketiga cerita tersebut terletak pada penyebab kepergian tiap-tiap tokoh. Nyi Blorong diusir karena kejahatannya, Dewi Lanjar pergi untuk mengobati sakit hati karena ditinggal suami, dan Nyi Puspo Cempoko pergi untuk menghindari kawin paksa. Dalam konteks tersebut, motif Dewi Lanjar dan Nyi Puspo Cempoko punya kemiripan. Bisa jadi karena latar kultur pesisir yang membuat mereka sama dalam merespon masalah. Kisah lain yang mirip dengan Nyi Puspo Cempoko adalah Roro Mendut, cerita rakyat dari Pati, meskipun Roro Mendut tidak berujung pesugihan sebagaimana Nyi Puspo Cempoko, juga Dewi Ontrowulan-Pangeran Samudro atau Roro Kembang Sore-Pangeran Lembu Peteng. Bisa jadi karena Roro Mendut berasal dari kalangan masyarakat bawah, dan petilasan atau makamnya tidak dijadikan sebagai sarana untuk *ngalab berkah* dan ziarah kubur.

Adapun untuk kelanjutan cerita bersua dengan Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Blorong dan Dewi Lanjar memiliki kesamaan motif. Keduanya diakui sebagai anak buah penguasa keraton Laut Selatan. Dalam khazanah Jawa, terutama historiografi tradisional Jawa dan mitologi Jawa, posisi penguasa Laut Selatan itu sangat sentral dan vital. Bahkan terdapat ritual dan beberapa bangunan di Keraton Jawa, yang khusus dipersembahkan pada penguasa Laut Kidul tersebut, salah satunya adalah Panggung Sanggabuwana di Keraton Kasunanan Surakarta dan situs bangunan lainnya di Kasultanan Yogyakarta (Wessing, 1997; Twikromo, 2000).

**Tabel 2**  
**Pola Kekerabatan Sembilan Cerita Pesugihan**

<b>Motif</b>	<b>Cerita Pesugihan</b>
Benda	Gunung Kawi, Pohon Ketos
Tabu/Larangan	Gunung Kemukus, Roro Kembang Sore
Hewan Luar Biasa	Makam Ngujangan, Pulau Seprapat
Orang Tertentu	Nyi Blorong, Dewi Lanjar, Nyi Puspo Cempoko

### **PARADOKS TEKS-KONTEKS**

Sumardjo (2014) menjelaskan, cerita menjadi paradoks karena memiliki atau mengandung dua makna yang saling bertolak belakang, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum berdasarkan logika empiris, sedangkan makna khusus berdasarkan logika kaum makrifat sehingga makna umum bersifat eksoterik dan makna khususnya esoterik (hlm. 13). Namun, dalam konteks cerita pesugihan, yang paradoks dan bertolak belakang tidak hanya ceritanya, tetapi juga dengan konteksnya, yang meliputi realitas sosio-kulturalnya. Sisi paradoknya menyerupai pertunjukan wayang kulit Jawa. Makna ruang sering kali terbalik. Dari belakang dalang, ruang kanan adalah 'baik', tetapi ruang kiri 'jahat'. Namun, dari balik kelir, ruang kiri adalah baik, sedangkan ruang kanan yang jahat. Dalam konteks demikian, nilai baik dan jahat itu bergantung pada dari mana menilainya (Sumardjo, 2014: 13). Sementara itu, sisi paradoks cerita pesugihan dalam kerangka teks-konteksnya sangat banyak. Namun, dalam kesempatan ini diperikan menjadi tiga



macam, meliputi paradoks sakral-profani, paradoks kepentingan ekonomi pasar-orisinalitas, dan paradoks fakta-fiksi.

### **Peleburan Sakral dan Profan**

Chambert-Loir dan Guillot (2007) menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara tokoh yang semasa hidupnya sebagai orang yang melanggar tatanan masyarakat, orang suci, maupun raja yang dihukum, terkait dengan tradisi *ngalab berkah* dalam ziarah kubur yang dilakukan para peziarah di Indonesia. Rerata peziarah pun *ngalab berkah* dan berdoa di situs makam agar tujuan-tujuannya tercapai, tanpa memedulikan kecenderungan hidup si tokoh, menyamping kuburnya dikaramatkan secara kolektif. Hal itu pula yang terjadi untuk cerita pesugihan yang bersandar pada makam atau tokoh historis atau pseudohistoris. Hal itu berlaku untuk “Pesugihan Gunung Kawi” dengan pusat makam Eyang Djoego dan R.M. Iman Soedjono, “Pesugihan Gunung Kemukus” dengan pusat makam Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan, “Pesugihan Pulau Seprapat” dengan pusat makam Datuk Lodang, dan “Pesugihan Nyi Puspo Cempoko” dengan pusat makam Nyi Puspo Cempoko di Kabongan Rembang.

Dengan demikian, hingga kini, di Gunung Kawi, dapat dijumpai peziarah di makam Eyang Djoego dan R. Iman Soedjono untuk berkirim doa versi agama-agama formal dan ada pula yang berziarah dalam rangka untuk pesugihan. Meskipun dalam buku petunjuk ziarah disebutkan bahwa berziarah ke Gunung Kawi bukanlah pesugihan karena Eyang Djoego adalah seorang wali. Hal yang sama juga terjadi di makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus. Banyak yang datang untuk berziarah secara lazimnya, baik yang berlatar santri maupun Kejawan, tetapi di sisi lain, ada orang-orang yang berniat melakukan ritual seks terlarang dengan pasangan yang sudah tersedia di beberapa warung di sekitar makam. Begitu pula dengan Pesugihan Pulau Seprapat, meski kini jarang ditemukan adanya ritual pesugihan di sekitar makam Datuk Lodang, yang bila mengacu pada dua versi cerita, memang sebagai dua subjek yang berbeda.

Sesungguhnya ritual seks bebas dengan tujuan merengkuh pesugihan termasuk dalam konteks tarikan antara sakral dan profan yang radikal, sebagaimana yang berlaku di Gunung Kemukus dan Gunung Bolo. Bila dilihat dari nilai-nilai kekinian, “laku” itu merupakan tindakan profan dan bila terkait dengan spiritualitas, cenderung dianggap menyimpang. Namun, bukan berarti ritual tersebut tanpa akar tradisi. Dalam sejarah perkembangan keagamaan era kerajaan Jawa klasik, dimungkinkan adanya akar tradisi yang mendasari ritual tersebut. Pada masa lalu, *tantrisme* dianut beberapa raja kerajaan-kerajaan besar di Jawa *tempo doeloe*. Sebagaimana diketahui, raja Singasari terakhir, Prabu Kertanegara (1268—1293), adalah penganut *tantrik* dan menganggap bahwa pesta minuman keras dan seks sebagai jalan pembebasan. Pada saat kerajaan Singasari diserang oleh Jayakatwang dari Kediri, Prabu Kertanegara sedang menjalankan pesta *tantrik* sehingga ia tidak memiliki persiapan untuk menangkal penyerangan tersebut. Ajaran tersebut merupakan perkembangan lain dari sinkretisme Hindu—Budha yang bermula dari pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes, yang pada akhirnya menjadi sebuah agama negara dengan nama agama Siwa-Budha yang berlaku hingga Majapahit (Soejono dan Leirissa, 2010; Kartodirdjo, 2012: 97; Munandar, 2013: 4), bahkan salah satu tinggalan Majapahit akhir, simbolisasinya mengarah ke tradisi *trantrik*, yaitu Candi Sukuh. Dalam konteks ini, seks yang dipahami orang modern sebagai hal profan



adalah “laku” sakral bagi para penganut ajaran tersebut. Dengan demikian, seks dianggap sebagai jalan untuk merengkuh kekuatan adikodrati, sebagaimana keberadaan keyakinan pada seks untuk *ngelmu*, seperti fenomena Sumobawuk di Kediri pada 1980-an dan Dukun Datuk di Padang pada 1990-an. Selain itu, ditambah lagi adanya himbauan dari tokoh pesugihan yang dirangkai atau dikonstruksi sebagai pembenar “laku” tersebut dalam tradisi lisan dengan menyatakan, barang siapa yang meneruskan kisah cinta terlarang mereka akan mendapatkan keberuntungan dan rezeki yang melimpah. Bila ritual pesugihan dengan seks bebas dibandingkan dengan akar tradisinya, yang terjadi adalah sebuah ritual yang salah waktu dan keliru tujuan.

Paradoks juga berlaku terkait mitos tanaman suci dan keramat. Daun dalam dunia kepustakaan Indonesia, terutama pepatah dan kata bijak, sangat dikenal meskipun menunjukkan kebalikannya. “Dunia tidak selebar daun kelor”, artinya dunia itu sangat luas. Begitu pula dengan “seperti air di daun talas”, bukan merujuk pada air yang melambangkan kesejukan dan kebeningan, bukan pada daun yang mengarah pada hijau dan damai, tetapi sebaliknya bahwa “orang yang dilambangkan dengan itu tidak dapat dipercaya”. Hal itu berbeda dengan pepatah kejatuhan daun Dewandaru di Gunung Kawi atau daun Ketos di Bero. Artinya, itu pertanda keberuntungan. Keberuntungan yang dimaksud adalah bagi para pencari pesugihan. Bahkan, perkembangannya kini tidak hanya daun, tetapi ranting dan buah, terutama Dewandaru. Dalam kasus tersebut, terdapat tarikan dari profan ke sakral, dan tentu dalam ini kerangkanya bukan logika, tetapi dalam kerangka agama primitif lebih berorientasi pada supranatural (Pritchard, 1984: 104). Akar keyakinannya merujuk pada pohon-pohon suci dalam keyakinan lama, sebagaimana konsepsi tentang pohon kehidupan atau pohon hayat, atau pohon yang tumbuh di nirwana dalam pewayangan. Dapat pula pada soal magi karena ada tanaman tertentu yang disukai makhluk astral dan dijadikan sebagai medium untuk berhubungan dengan mereka (McKenna, 1992).

### **Antara Keaslian Versi dan Selera Pasar**

Blorong hadir secara ambigu dalam literatur makhluk halus di Indonesia. Bahkan Boomgaard (1993) menemukan dalam beberapa literatur (1855—1875), Blorong adalah laki-laki dan disebut Kiai Blorong. Dalam literatur 1879—1924, Blorong adalah sepasang Ki dan Nyai. Namun, setelah 1929, Blorong hadir sepenuhnya perempuan (hlm. 202—5). Hanya saja, di kalangan masyarakat Jawa selama ini, diskursus yang berkembang, banyak pandangan yang menyamakan Nyi Blorong dengan Kanjeng Ratu Kidul. Selain karena sosoknya yang digambarkan sama, cantik, suka berkebaya hijau dan bertempat di Laut Kidul, bahkan ada yang menyatakan Blorong sebagai alter-ego Kanjeng Ratu. Jika mengacu pada *Serat Centini* (Ranggasutrisna, 1990: 70—71), yang juga digurat dalam *Serat Kandaning Ringgit Purwa* (Sarman, 1986), keduanya adalah khazanah Jawa yang ditulis tahun 1800an, Blorong adalah perempuan karena ia merupakan anak Kanjeng Ratu Kidul (cerita versi 1). Dengan demikian, antara Kanjeng Ratu dan Nyi Blorong adalah dua pribadi berbeda karena karakter dan sifatnya dianggap berlainan. Sebagaimana tengara Twikromo (2000) berdasarkan pengalaman seorang paranormal bahwa Blorong memang sering menyaru sebagai Kanjeng Ratu Kidul, dan bagi yang memercayainya sangatlah berbahaya karena Ratu Kidul sangat welas asih, sedangkan Blorong sebaliknya (hlm. 61). Selain itu, tempatnya pun berbeda karena



Laut Kidul identik dengan keraton Ratu Kidul, dan Nyi Blorong dipercaya di Sendang Pengilon, Bantul. Ketika ia menyamar sebagai Ratu Kidul, berarti ia sedang dinas di keraton Ratu Kidul. Namun, dalam diskursus lain, Nyi Blorong dianggap sebagai sosok historis dengan mengacu pada silsilah Raja Galuh, yang sejajar dengan historisasi Ratu Kidul sebagai Dewi Kandita, putri raja yang terusir dari istana Pajajaran (Twikromo, 2000). Dalam modifikasi historis, keduanya ditampilkan sebagai mojang Sunda.

Meski Nyi Blorong berstigma negatif dalam jagad kultural Jawa, ia menempati wilayah tersendiri yang unik, misalnya, bila ada perempuan cantik yang memakai perhiasan emas yang mencolok, ia langsung dicap mirip Blorong. Bahkan, di Sendang Pengilon, yang dianggap sebagai tempat Blorong, ia tidak dicitrakan sebagai makhluk yang kejam. Tak heran, dalam beberapa primbon Jawa, terdapat mantra permintaan kekayaan, yang diringi dengan laku yang merujuk pada Nyi Blorong, yang dalam mantra disebut dengan Nini Blorong, dan dianggap sebagai makhluk halus welas asih. Mantra tersebut dinamakan *Aji Ngirup Banda*, dan disebut aji karena mantra ini baru dapat diterapkan bila diiringi dengan puasa *mutih* selama 7 hari 7 malam, *patigeni* sehari semalam, dan dimulai pada hari Jumat Pahing. Mantra ini harus diucapkan setiap tengah malam pukul 00.00, di halaman depan. Berikut bunyi mantranya: “*Ingsun amatak ajiku si Nini Blorong, Nini Blorong daktempuhake anyukupi sandang pangan kanga gung, amboyonga kasugihane Sri Sadana wadhahana ing gedhong arajabrana, sakehing pangan lebokna ing lumbung gumuling, aja esat ing selawase*”. (Noeradyo, 1994: 37)

Di sisi yang berbeda, keberadaan pesugihan Nyi Blorong, Pesugihan Dewi Lanjar, dan Pesugihan Nyi Puspo Cempoko sebenarnya dapat membalik anggapan bahwa “mata duitan” alias *matre* adalah perempuan karena terbukti laki-laki juga dapat sangat *matre*, bahkan menjual jiwanya untuk kepentingan harta benda. Namun, untuk menjual jiwa yang mengarah pada urusan seks itu tidak ditemukan pada literatur pesugihan, baik yang ditulis oleh kalangan orientalis maupun sumber-sumber naskah kuno. Van Hien (1896) yang tercatat sebagai ahli yang memberi perhatian pada Blorong pertama kali menjelaskan bahwa Blorong sebagai makhluk yang “segala jenis kekayaan akan diberikan kepada si pemanggil. Hal itu berjangka waktu selama tujuh tahun, tetapi bisa diperpanjang hingga dua kali lagi. Namun, selama itu harus ada yang dikorbankan, dan terakhir si pemanggil itu yang menjadi korban dan mengisi istana Nyai Blorong” (hlm. 112).

Wacana seksisme Nyi Blorong dimungkinkan berkembang seiring film-film nasional bertema horor marak pada tahun 1970an, seperti kemunculan *Beranak dalam Kubur* (1971) dan *Setan Kuburan* (1975). Fenomena itu kemudian memuncak pada tahun 1980an, dengan racikan unsur horor dan unsur seks, salah satunya adalah *Nyi Blorong* (1982), yang disusul dengan *booming* film horor yang diramu antara seks, *action*, dan humor, dengan bintang legendaris Suzana dan kawan-kawan. Aroma seks memang sengaja ditebar karena dalam budaya populer mengarah pada komoditas dan pasar. Sekali lagi, tenggara tersebut dipicu oleh tiadanya referensi yang berbau seksual terkait dengan Pesugihan Nyi Blorong, juga Pesugihan Dewi Lanjar dan Pesugihan Nyi Puspo Cemporo karena rerata yang diminta bukan soal layanan seks, tetapi tumbal nyawa. Adapun soal kamar khusus yang diimajinasikan sebagai kamar khusus untuk meladeni nafsu seksual para setan pesugihan tersebut berfungsi mirip dengan pesugihan lainnya yang membutuhkan ruang khusus, tempat menaruh sesaji persembahan, dan sebagai ruang pertemuan



yang tidak semata-mata mengarah pada seks, yang dalam beberapa film horor seks selalu digambarkan mengarah pada adegan ranjang. Selain itu, hasil wawancara dengan Ki Wejang Kawedar, ahli kejawen dan keturunan Pura Mangkunegaran (2010) bahwa perkawinan antara manusia dan makhluk halus dapat terjadi, tetapi tidak saling menyakiti dan mengintimidasi. Artinya, pernikahan itu bukan semata-mata seks, tetapi terkait daya tarik yang bersifat auratik, bahkan cinta. Dengan demikian, wacana seks yang meliputi sosok Nyi Blorong, Dewi Lanjar dan Nyi Puspo Negoro sebagai makhluk halus haus seks sebagai komoditas, sebuah modus untuk menarik minat pasar dan bersifat ekonomi-bisnis, terutama untuk produk budaya populer yang berorientasi pada selera pasar.

### **Kekaburan Fakta dan Fiksi**

Meskipun sebagian besar cerita pesugihan termasuk legenda, tetapi wilayahnya sudah memasuki mite, artinya sebagian besar dianggap nyata dan terjadi. Apalagi beberapa di antara tokohnya dipandang sebagai sosok historis. Salah satu penegasan sosok historis adalah keberadaan makam yang dinisbatkan kepada tokoh bersangkutan, seperti Eyang Djoego, Syekh Datuk Lodang, Pangeran Samudro, Nyi Puspo Cempoko, Roro Kembang Sore, Eyang Bandho, Eyang Sentono Renggo (Makam Ngujang). Adapun selebihnya seperti Nyi Blorong dan Dewi Lanjar dianggap makhluk mitos. Meski demikian, setiap cerita memiliki kekhasannya tersendiri, misalnya, “Pesugihan Pulau Seprapat”.

Pulau Seprapat termasuk pulau legendaris, bersejarah dan kosmopolit. Cerita pesugihan yang dimaksud menunjukkan ke arah tersebut, baik versi 1 maupun versi 2. Versi 1 merujuk pada asal-usul pulau itu yang mengacu pada pendatang dari negeri Cina, Dampo Awang, yang meninggalkan kekayaannya seperempat di pulau tersebut sehingga disebut Pulau Seprapat. Versi 2 merujuk pada keberadaan sebuah tempat pesugihan dan komunitas kera meskipun pada akhir-akhir ini “laku” mencari pesugihan semakin langka, seiring dengan komunitas kera berekor panjang di Pulau Seprapat yang punah. Namun, keberadaan Datuk Lodang menegaskan kosmopolitan Pulau Seprapat.

Awalnya, diduga ada Islamisasi terhadap cerita Pesugihan Pulau Seprapat versi 1 tentang asal-usul kera dengan kemunculan versi 2 tentang sejarah Datuk Lodang. Namun, dugaan itu pun terevisi karena ada kecenderungan dalam cerita tutur di Jawa yang menganggap kejadian pada masa kerajaan-kerajaan dulu terjadi dalam satu waktu. Padahal antara kejadian satu dengan kejadian lainnya memiliki jarak waktu yang panjang, bahkan ada yang berabad-abad. Cerita “Pesugihan Pulau Seprapat” versi 1 merupakan sebuah jenis legenda, adapun versi 2 termasuk ranah sejarah. Dengan demikian, antara versi 1 dan versi 2, relasi waktunya adalah kronologis, bukan paralel. Versi 1 berbicara tentang asal-usul Pulau Seprapat dan komunitas keranya, sedangkan versi 2 berkisah jati diri Datuk Lodang. Dari cerita itu, Datuk Lodang hidup semasa dengan Sunan Muria dan Sunan Muria adalah sosok historis. Ia adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Sujinah (putri Utsman Haji) dan memiliki seorang putra yang bernama Pangeran Santri yang tinggal di Kadilangu (Mustofa, 2004: 22; Sunyoto, 2016: 362)

Ihwal kontradiksi fakta-fiksi juga menggelayuti keberadaan beberapa situs dan tokoh lainnya dalam cerita pesugihan, salah satunya Pangeran Samodra. Selain adanya kepentingan untuk menghapus cerita bahwa yang terjadi adalah cinta terlarang antara seorang pangeran dengan ibu tirinya, ada upaya untuk melakukan



Islamisasi dan moralisasi cerita, terutama versi 2, dan ditulis dalam *Cerita Rakyat Jawa Tengah* dengan judul “Pangeran Samudra, Putra Prabu Brawijaya”. Di sisi yang berbeda, dalam *Serat Sindujoyo*, sebuah khazanah pesisir utara Jawa Timur yang dalam salah satu fragmennya mengisahkan persinggungan tokoh utama Sindujoyo dengan Gunung Kemukus. Dalam naskah kuno pesisir tersebut, sama sekali tidak disebut adanya makam Pangeran Samudro dan Sendang Ontrowulan di Kemukus. Bahkan, yang disebutkan hanya sebuah gua, tempat tokoh tersebut bertapa dan mendapatkan kesaktiannya untuk membantu raja Mataram, Pangeran Sedo Ing Krapyak, yang berkeraton di Plered menumpas pemberontakan Pangeran Puger, adik raja, yang menjadi adipati di Demak. Saudara raja itu dapat ditawan dengan dimasukkan keranjang, tetapi segera diampuni dan dihukum ringan (de Graaf, 2002: 4—11). Peristiwanya terjadi pada tahun 1605 M, sedangkan *Serat Sindujoyo* ditulis pada tahun 1778 S/1849 M (Mashuri, 2017).

**Tabel 3**  
**Paradoks Sembilan Cerita Pesugihan**

<b>Paradoks</b>	<b>Cerita Pesugihan</b>
Sakral vs Profan	Gunung Kawi, Gunung Kemukus, Pulau Seprapat, dan Nyi Puspo Cempoko
Versi Autentik vs Selera Pasar	Nyi Blorong, Dewi Lanjar, Nyi Puspo Cempoko
Fakta vs Fiksi	Gunung Kawi, Gunung Kemukus, Nyi Puspo Cempoko, Pulau Seprapat, Makam Ngujang

## **PENUTUP**

Dari rekonstruksi cerita, pola kekerabatan sembilan cerita pesugihan di Jawa meliputi empat tipe-motif, yaitu berdasar kesamaan benda (Pesugihan Gunung Kawi dan Pesugihan Pohon Ketos), tabu/larangan (Pesugihan Gunung Kemukus dan Pesugihan Roro Kembang Sore), hewan luar biasa (Pesugihan Makam Ngujang dan Pesugihan Pulau Seprapat), dan tipe orang tertentu (Pesugihan Nyi Blorong, Pesugihan Dewi Lanjar, dan Pesugihan Nyi Puspo Cempoko). Empat motif tersebut dapat berkembang. Hal ini merupakan langkah awal untuk merumuskan peta sastra terkait cerita rakyat berbasis pesugihan di Jawa. Karena masih banyak cerita pesugihan lainnya yang perlu diinventarisir, kemudian digali tipe-motifnya untuk merumuskan sebuah peta sastra yang menyeluruh.

Fokus kajian pada cerita pesugihan bukan untuk mencari sensasi karena watak pesugihan yang kontradiktif dan dianggap sebagai sisi gelap kebudayaan Jawa. Pasalnya, cerita pesugihan tersebut menyimpan paradoks karena sering kali masyarakat terjebak pada makna umum, dan tidak menelusuri makna khusus. Dengan demikian, ada pemaknaan yang menyimpang antara teks dan konteks. Tentu pemaknaan tersebut bukan jatuh dari langit, tetapi melewati proses panjang, semacam lubang hitam, yang melibatkan waktu dan ruang. Dalam perjalanannya, terdapat retakan, pemiuhan, tumpang-tindih berbagai kepentingan, juga tarik-ulur kemanusiaan sehingga konteks cerita pesugihan pun bercitra kelam. Namun, dengan mengetahui kekelamannya, dapat dikenali lebih jauh proses ‘menjadi’ sebuah fenomena, tanpa bermain mutlak-mutlakan dengan mengeliminasi prasangka, dan kondisi-kondisi manusia Jawa dalam mempersepsi diri dan



kebudayaannya. Adanya paradoks teks-konteks menunjukkan bahwa antara manusia dan budaya terus berproses, hidup, dan dinamis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdau, L. (2013). *Ritual pesugihan di Gunung Kemukus (Studi diskriptif tentang ritual di Gunung Kemukus)*. Program Studi Sosiologi, FISIP Universitas Airlangga.
- Barker, C. (2014). *Kamus kajian budaya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Boomgaard, P. (1993). "Illicit riches: economic development and changing attitudes towards money and wealth as reflected in Javanese popular belief". dalam Lindblad, J.T. (Ed.). *New Challenges in the modern economic history of Indonesia*, hlm. 197–215. The Hague: Cip-Gegenvens Koninklijk Bibliotheek.
- Chambert-Loir, H. & Guillot, C. (2007). *Ziarah dan wali di dunia Islam*. (penerjemah: Jean Couteau, dkk.). Jakarta: Serambi.
- Danandjaja, J. (1984). *Folklor Indonesia; ilmu gosip, dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Grafiti.
- Desianasari. (2016). "Makna sosial ritual pesugihan bagi peziarah makam Roro Kembang Sore Gunung Bolo Tulungagung", dalam *Jurnal Komunitas*, Vol. 5/ No. 2/ 2016.
- De Graaf, H. J. (2002). *Puncak kekuasaan Mataram, politik ekspansi Sultan Agung*. Edisi Revisi. Jakarta: Grafiti dan KITLV.
- Djuweng, S. (1998). "Tradisi lisan Dayak dan modernisasi: refleksi metodologis peneliti sosial positif dan penelitian partisipatoris" dalam Pudentia (ed.). *Metodologi kajian tradisi lisan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan.
- Drewes, G.W.J. (1929). "Verboden rijkdom: Een bijdrage tot de kennis van het volksgeloof op Java en Madoera," dalam *Djawa* 9 tahun 1929.
- Faruk. (2008). *Pascastrukturalisme; teori, implikasi metodologi, dan contoh analisis*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Foucault, M. (2009). *Pengetahuan dan metode, karya-karya penting Foucault*. Yogyakarta: Jalasutra
- Hadi, P.H (2016). *Fenomena pesugihan di pesarean Gunung Kawi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dan muatan pendidikannya*" Skripsi, Jurusan Sejarah, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Tidak diterbitkan.
- Harris, D.C. (2009) *Ziarah in the Javanese Context*. Tesis MA Universitas Northern Illinois.
- Harthoorn, S.E. (1860). "De zending op Java en meer bepaald die van Malang," dalam *Madedelingen van het Nederlandsch Zendelingen Genootschap* 4, tahun 1860.





- Hooykas, J.H. (1929) “Volksoverlevering in Beeld” dalam *Djawa IX*, Surakarta; Secretariaat van Het Java Institut.
- Jamil, T.I. (1987). “Wawancara A. Teeuw: Jawanisasi kesusastraan Indonesia”, dalam *Horison*, No. 2, Februari 1987.
- Kartodirdjo, S. Soekmono, R. Atmadi, P, Sedyawati, E. (2012). *700 Tahun majapahit (1293—1993), suatu bunga rampai (Edisi 3)*. Surabaya: Dinas Pariwisata Jawa Timur.
- Kodiran. (1987). “Kebudayaan Jawa” dalam Koentjaraningrat (ed.). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kremer, J. (1904). “Blorong of de geldgodin der Javanen”, dalam *Mededelingen van wege het Nederlandsche Zendelinggenootschap*.
- Geertz, C. (1983). *Abangan, santri, priyayi dalam masyarakat Jawa*. (penerjemah Aswab Mahasin). Jakarta : Pustaka Jaya.
- (1992). *Tafsir kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (1993). *Etika Jawa, sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Mashuri. (2017). “Kesejarahan desa-desa pesisir dalam *Serat Sindujoyo*” dalam *Manuskripta (Jurnal Manassa)*, Vol. 7 (2), 2017.
- McKenna, T. 1992. *Food of The Gods, a radical history of plants, drugs and human evolution*. London: Rider.
- Munandar, A.A. (2013). *Tidak ada kanal di Majapahit*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Mustofa, B. (2004). *Tarikhul auliya, silsilah Walisanga*. (Penerjemah: Basyir A.M. & Ulum, A.F.). Yogyakarta: Gama Media.
- Noeradyo, S.W.S. (1994). *Primbon ajimantrawara, yogabrata, rajahyogamantra*. Yogyakarta: Soemodidjojo Maha-Dewa.
- Onghokham. (2002). *Dari soal priyayi sampai Nyi Blorong:refleksi historis Nusantara*. Jakarta: KPG.
- Pemberton, J. (2003). “*Jawa*”, *on the subject of “Java”*. (Penerjemah: Hadikusumo, H.) Yogyakarta: Matabangsa.
- Pritchard, E. E. E. (1984). *Teori-teori tentang agama primitif*. Yogyakarta: Pusat Latihan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (PLP2M).
- Pudentia, M.P.S.S. (1992). *Transformasi sastra, analisis atas cerita rakyat ‘Lutung Kasarung’*. Jakarta: Balai Pustaka.
- (ed.). 1998. *Metodologi kajian tradisi lisan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan.
- Ranggasutrasna, N. (1991). *Centhini: tambangraras-amongraga, Jilid I*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ritzer, G. (2003). *Teori sosial postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Roibin (2008). *Mitos pesugihan dalam tradisi keberagamaan masyarakat muslim kejawaen; studi konstruksi sosial mitos pesugihan para penziarah muslim*



*kejawen di Gunung Kawi Malang*. Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya.  
Tidak diterbitkan.

- Santosa, E. (2003). *Cerita rakyat Tulungagung*. Jakarta: Grasindo.
- Sarman, A.A. (1986). *Serat kandhaning ringgit purwa*. Jakarta: Djambatan.
- Soejono, R.P. & Leirissa, R.Z. (2010) *Sejarah nasional Indonesia II zaman kuno, Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soembogo, W.H. (tt). *Kitab primbon qurasyn adammakna*. Yogyakarta: CV. Buana Raya
- Subagya, R. (1981). *Agama asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Sumardjo, J. (2014). *Paradoks cerita-cerita si Kabayan*. Bandung: Yrama Media.
- Sunyoto, A. (2016). *Atlas walisongo, Edisi Revisi*. Bandung: Pustaka Iman.
- Taum, Y. Y. (2011). *Studi sastra lisan; sejarah, teori, metode dan pendekatan disertai contoh penerapannya*. Yogyakarta: Lamalera.
- Tim Balai Bahasa Yogyakarta. (2011). *Kamus basa Jawa (Bausastra Jawa) Edisi Kedua*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Penulis Sena Wangi. (1999). *Ensiklopedi wayang Indonesia 1—2*. Jakarta: Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia.
- Tim Pustaka Setia. (2006). *Cerita rakyat Jawa Tengah, Volume 6*. Surakarta: Pustaka Setia.
- Trunarimong, K & Indrajati, S. (1966). *Kitab mantra Yoga*. Solo: Sadu Budi.
- Twikromo, Y.A. (2000). *Ratu kidul*. Yogyakarta: Bentang.
- Van Hien, H.A. (1896) “De Javaansche geestenwereld, en de betrekking, die tussen de geesten en de zinnelijk wereld, verduidelijkt door petangan's of tellingen bij de Javanen in gebruik”.
- Wessing, R. (1997). “A Princess from Sunda: Some Aspects of Nyai Roro Kidul” dalam *Asian Folklore Studies* Vol. 56 tahun 1997.
- (2006). “Homo narrans in East Java” dalam *Asian Folklore Studies* Vol. 65 tahun 2006.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 2 Kelompok 1**

Pembicara : Mashuri

Judul Makalah : “Cerita-Cerita Pesugihan di Jawa Pola Kekerabatan Sastra dan Paradoks Teks-Konteks”

Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018

Pukul : 19.30—21.00

Moderator : Dr. Sastri Sunarti

Pencatat : 1. Dina Alfiyanti Fasa  
2. Ibnu Kharish

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Kajian pesugihan banyak ditemukan dalam penelitian antropologi, sosiologi, dan agama, tetapi langka ditemukan dalam penelitian bahasa dan sastra.
2. Pengkajian sastra dan bahasa tentang cerita-cerita pesugihan di Jawa tidak banyak karena pesugihan dianggap sebagai residu atau “got” dalam kebudayaan Jawa. Tujuan penulis adalah untuk membuat peta dan ensiklopedia cerita rakyat.
3. Pesugihan dianggap sebagai residu kebudayaan Jawa berdasarkan opini paranormal atau spiritualis, opini antropolog Indonesia, opini antropolog dari luar Indonesia, dan opini publik.
4. Cerita-cerita pesugihan memiliki kekerabatan antara satu wilayah dengan lainnya.
5. Ada sembilan cerita pesugihan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang digunakan sebagai bahan penelitian berdasarkan lokasi geografis, keunikan, dan unsur pembentuk cerita.
6. Penulis melakukan rekonstruksi cerita karena adanya islamisasi cerita, moralisasi cerita, dan tumpang tindih unsur cerita.
7. Kekerabatan yang ditemukan berdasarkan motif benda, motif tabu/larangan, hewan yang luar biasa, dan tipe orang tertentu.
8. Paradoks yang ditemukan adalah paradoks antara sakral dan profan, versi autentik dan selera pasar, serta kekaburan fakta dan fiksi.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Yosti

Instansi : UPI

**Pertanyaan:**

Mengapa cerita-cerita pesugihan selalu berkaitan dengan seksualitas?

**Jawaban:**

Cerita pesugihan tidak melulu tentang seksualitas. Menurut saya, ada pengaburan antara legenda dengan mite.

**Penanya 2**

Nama : Rizki Abrian

Instansi : Universitas Airlangga

**Pertanyaan:**

Saya pernah menemukan ada praktik penggandaan uang melalui pesugihan serupa dengan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng. Kegiatan ini belangsung dengan dibalut unsur-unsur islami. Apakah ada cerita-cerita pesugihan Islam lainnya?

**Jawaban:**

Untuk praktik penggandaan uang, hal ini bukan pesugihan. Penggandaan uang merupakan hal yang berbeda. Penggandaan uang ini memang banyak dilakukan dalam praktik-praktik Islam.

**Penanya 3**

Nama : Pipit

Instansi : Universitas PGRI Semarang

**Pertanyaan:**

Ada beberapa tempat yang belum ada dalam cerita-cerita pesugihan padahal masyarakat tahu tentang tempat-tempat dan cerita-cerita di pesisir tersebut. Apakah ada motif tertentu yang menjadikan tokoh-tokoh perempuan di daerah pesisir Jawa sebagai objek pesugihan? Kenapa tokoh dalam persebaran agama Islam itu berupa tokoh perempuan yang distigmakan negatif?

**Jawaban:**

Cerita-cerita pesugihan sering dijadikan motif untuk membangun lokalisasi di tempat tersebut. Anggapan mengenai perempuan yang dijadikan objek, menurut saya malah terbalik karena orang yang materialistis sebetulnya adalah laki-laki karena pelaku pesugihan sendiri adalah laki-laki.

**Penanya 4**

Nama : Prih Suharto

Instansi : Badan Bahasa

**Pertanyaan:**

Ada beberapa tempat lain yang juga dikenal sebagai tempat pesugihan.

**Jawaban:**

Untuk Pulau Seperapat, sudah tidak ada lagi pesugihan karena saat ini sudah ada penganut Islam puritan. Persoalan kita saat ini adalah ketidakjelasan identitas. Orang Madura ditanya paparegen tidak tahu. Kondisi ego kultural kita itu compang-camping. Dalam kerangka ini, hal-hal yang ditutupi seperti “residu” dan “got” itu tidak perlu ditutupi. Yang asli terkait pesugihan itu perlu dihadirkan, dan yang sudah digubah itu juga perlu dihadirkan.



**Isu-Isu Penting:**

“Residu” masih diperlukan dalam wacana di masyarakat karena merupakan gambaran situasi sosial di masyarakat.



## 9. Tanding Sastra *Putran*: Sebuah Analisis Wacana Foucault terhadap Teks *Centhini* Pascareformasi

### TANDING SASTRA *PUTRAN*: SEBUAH ANALISIS WACANA FOUCAULT TERHADAP TEKS CENTHINI PASCAREFORMASI

*Putran Literature Signs:*

*An Analysis of Foucault Discussion on Post Reform Centhini Text*

**Rendra Agusta, Dwi Susanto, Wakit Abdullah Rais**

Universitas Sebelas Maret Surakarta

kangrendraagusta@gmail.com

#### **Abstrak**

*Serat Centhini* adalah mahakarya dalam khazanah kesusastraan Jawa. Setelah era pascareformasi *Centhini* dihadirkan kembali sebagai budaya populer dalam berbagai bentuk. Yang menjadi masalah adalah (1) bagaimana sejarah teks *Centhini* dari masa penciptaan sampai era pascareformasi? (2) Bagaimana formasi diskursif dalam teks *Centhini* di era pascareformasi? Penelitian akan mendeskripsikan pertarungan wacana teks *Centhini* di era pascareformasi. Melalui pendekatan kajian budaya, secara khusus menggunakan analisis genealogi *Foucault*. Transformasi teks tradisional ke dalam bentuk baru, yakni entitas nasional dipercaya sebagai langkah awal yang mampu mengokohkan kembali kekuasaan tertentu. Dalam konteks *Centhini*, gubahan ke dalam bentuk prosa dengan bahasa nasional atau internasional dipercaya menumbuhkan wacana keagungan kebudayaan Jawa. Di sisi lain, gubahan sastra lama ini juga bisa berbalik arah, hilangnya kesadaran melestarikan kebudayaan daerah, utamanya bahasa dan sastra Jawa.

**Kata-kata kunci:** *centhini*, wacana kekuasaan, kajian budaya, transformasi, pascareformasi

#### **Abstract**

*Serat Centhini is a masterpiece in the treasury of Javanese literature. After the post-reform era Centhini was re-presented as a popular culture in various style. The problem is (1) How is a history of the Serat Centhini from beginning to post-reform era? (2) What is the discursive formation in the Serat Centhini in the post-reform era? The study will describe Centhini's text discourse contest in the post-reform era. Through the approach of cultural studies, specifically using Foucault genealogy analysis. The transformation of traditional texts into a new form of national entity is believed to be the first step in reinforcing certain powers. In context of Centhini, compositions into prose with national or international languages are believed to foster the discourse of the greatness of Javanese culture. On the other hand, these old literary compositions can also reverse direction, loss of consciousness to preserve local culture, especially Java language and literature.*

**Keywords:** *centhini*, discourse of power, cultural studies, transformation, post reformation



## PENDAHULUAN

*Serat Centhini* adalah mahakarya dalam khazanah kesusatraan Jawa. Nama *Centhini* lebih dikenal untuk menyebut karya sastra ini daripada judul aslinya, yakni *Suluk Tambangraras* (Zoetmulder, 1939: 67). Behrend (1990) menyebutkan bahwa jumlah naskah *Serat Centhini* yang utama lebih dari 200 buah (hlm. 264). Hal itu belum termasuk yang dimiliki oleh perorangan. Dalam *Serat Centhini* terkandung banyak informasi sehingga karya ini sering disebut sebagai ensiklopedi kebudayaan sekaligus puncak ekspresi sintesis mistik kepercayaan masyarakat Jawa (Marsono, 2004: v, Ricklefs 2012: 40). Kemahsyuran *Serat Centhini* tidak lepas dari pemakranya, yakni Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara III (kelak menjadi Pakubuwono V), (Suhatmaka, 1981: 7; Soebardi, 1975: 10). Amangkunagara III adalah seorang pangeran yang memiliki kecintaan pada penulisan karya sastra walaupun ia juga didampingi oleh Yasadipura II (Poerbatjaraka 1952: 3). Naskah ini memiliki ketebalan 4.200 lembar folio yang terbagi dalam 12 jilid, 725 tembang, dan memiliki keistimewaan kandungan isi teksnya. *Sengkalan* tahun *Serat Centhini* berbunyi *paksa suci sabda ji* yang berarti tahun 1742 tahun Jawa atau 1814 Masehi. Penanda tahun itu menunjukkan bahwa karya sastra ini dibuat pada masa keraton Surakarta berada di bawah pemerintahan Sunan Pakubuwono IV atau enam tahun menjelang dinobatkannya Sunan Pakubuwono V.

Penulisan *Centhini* ini memakan waktu 9 tahun, yakni tahun 1814—1823 Masehi. Penulisan dibantu oleh 3 orang pujangga, yaitu R. Ng. Ranggasutrasna, R. Ng. Yasadipura II atau Raden Tumenggung Sasranagara), dan R. Ng. Sastradipura atau Kyai Haji Muhammad Ilhar (Tim Penyadur, 1991: ix). Secara ringkas *Serat Centhini* menceritakan perjalanan putra-putri Sunan Giri, yakni Jayengresmi, Jayengraga/Jayengsari, dan Ken Rancangkapti setelah dikalahkan oleh Pangeran Pekik dari Surabaya, ipar Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Selain itu, *Centhini* juga menceritakan perjalanan Cebolang, seorang anak ulama di Sokayasa bernama Ki Akhadiyat.

Unsur intertekstualitas berpengaruh besar dalam menunjukkan wacana, seperti halnya penulisan di Jawa tidak ada yang *mutrani* secara linier. Sebagai contoh kita dapat menilik *Centhini* Kadipaten mengambil beberapa teks dari *Serat Jatiswara*, lalu *Centhini* juga diadopsi ke *Serat Kalatidha* karya Ranggawarsita (Florida, 2003: 22). Proses *mutrani* ini kemudian berlangsung dalam berbagai zaman. Sejak masa penjajahan kolonial hingga era kemerdekaan. Runtuhnya totalisme negara pada Mei 1998 memulai era keterbukaan dalam perkembangan karya sastra di Indonesia. Perkembangan karya sastra muncul dalam unit-unit kecil yang mandiri dan tidak terpusat. Kebebasan menulis di era ini memungkinkan terjadinya penciptaan teks bebas. Nuansa liberal kembali terasa sehingga karya sastra dengan *genre* beragam mulai dari pengaruh marxisme, sastra Islami, hingga kehadiran kembali nuansa lokalitas. Kebudayaan daerah yang selama orde baru dianggap entitas pinggir, kini dihadirkan kembali melalui karya-karya sastra seperti cerita silat, novel sejarah, dan karya-karya dengan repertoar karya sastra lama ke tengah-tengah pusran metanarasi karya sastra di Indonesia. Kehadiran karya sastra lama kembali dalam dunia sastra pascareformasi cukup menarik dikaji.

Pascareformasi, *Centhini* dihadirkan dihadirkan kembali sebagai budaya populer. Dalam tulisan ini, peneliti menyebut *Centhini* dengan istilah sastra *putran* atau sastra turunan, yakni karya sastra hasil yang digubah dalam bentuk baru.



Proses ini ditandai dengan munculnya gubahan teks *Centhini* tahun 2002 oleh Elizabeth Inandiak yang berjudul *les chants de l'ille a dormir debout - le livre de Centhini*. Penulisan ini diikuti penulisan ulang yang lain dalam bentuk novel, seni pertunjukan maupun media elektronik. Pada seni pertunjukan, teks *Centhini* dipentaskan Slamet Gundono (2009) dalam bentuk pagelaran wayang berjudul *Wayang Kondom*, diikuti pagelaran Agnes Christina (2015). Selain itu, teks *Centhini* pernah menjadi salah satu lirik lagu Jogja Hiphop Foundation (2008) berjudul *Asmaradana 388*. Teks ini juga digubah menjadi sinetron. Salah satu judulnya adalah *Centhini Manis* (2016). Sinetron ini pernah meraih penghargaan dalam ajang *Indonesian Television Awards 2016* sebagai Program Prime Time Drama Terpopuler. Peristiwa akbar yang mengumpulkan para pakar pengkaji *Centhini* adalah *Borobudur Writer Festival* tahun 2016, sebagai peringatan 200 tahun *Serat Centhini*. Pada tahun 2017, sebuah serial misteri stasiun TV swasta di Indonesia mempunyai “Program Centhini”, yakni acara bernafas “horor” dalam dunia magis.

Sejak teks *Centhini Kadipaten* dibuat, teks ini menarik perhatian banyak cendekiawan baik pada masa kolonial maupun pascakemerdekaan. Beberapa tulisan tentang *Serat Centhini* sebelumnya, antara lain, Th. Pigeaud menulis buku *De Cebolang en de Serat Tjentini* pada tahun 1933. Buku ini memuat ringkasan kisah *Centhini* yang diterbitkan oleh *Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap*. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sumidi Adisasmita. Dia menulis tiga buku, yakni *Pustaka Centhini Selayang Pandang* (1974), *Mawas Serat Centhini, Jilid I--XII* (1975), dan *Pustaka Centhini: Ikhtisar Seluruh Isinya* (1979). Tulisan Sumidi ini memuat ringkasan lebih luas dan utuh serat *Centhini Kadipaten*, yakni dari Jilid I--XII. Selanjutnya usaha mengalihaksarakan secara utuh dilakukan oleh Karkono Kamajaya Partakusumo. Ia juga melatinkan *Serat Centhini Kadipaten* dari tahun 1985 sampai 1991. *Centhini* juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (1978), tetapi hanya Jilid I. Karkono juga menulis makalah “Serat Centhini Sebagai Sumber Inspirasi Pengembangan Karya Sastra Jawa” dalam Konggres Bahasa Jawa II di Semarang tahun 1996. Upaya ini dilanjutkan oleh Tim Universitas Gadjah Mada. Tim ini menerjemahkan dan menyadur *Serat Centhini Kadipaten* dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 1991/1992, tahap ini menerjemahkan/menyadur Jilid I--IV. Tahap kedua dikerjakan pada tahun 2005—2008 menerjemahkan/menyadur Jilid V--XII. Buku terjemahan ini berisi ikhtisar dan terjemahan *Serat Centhini* dari Jilid I--XII ke dalam bahasa Indonesia. Munarsih pada tahun 2006 menulis *Serat Centhini Warisan Sastra Dunia*. Buku ini menceritakan hal-hal penting yang ada di dalam *Serat Centhini*. Apa yang dilakukan ini mirip dengan apa yang dilakukan Djoko Dwiyanto pada tahun 2008. Ia menulis *Eksiklopedi Serat Centhini*. Buku ini berupa rangkuman data, fakta, dan analisis beberapa hal yang dianggap penting dalam *Serat Centhini*. Namun, eksiklopedia ini sifatnya hanya sekilas dan kurang mendalam. Siti Muslifah (2004) menulis tesis dengan judul *Serat Centhini Episode Centhini Naratologi dan Pendekatan Gender, Analisis Fabula*. Melalui analisis naratologi dan pendekatan gender dapat diketahui bahwa wanita Jawa dalam *Serat Centhini* adalah sebagai sosok pendengar, pembicaraan didominasi oleh laki-laki jika wanita berbicara maka sifatnya pasif, yaitu mengulang dan membenarkan pendapat laki-laki.





Dalam dunia linguistik Junanah (2008) melakukan penelitiannya berjudul *Pengaruh Bahasa Arab dalam Centhini* mengatakan bahwa perjalanan sastra Jawa merupakan karya sastra Jawa baru yang sudah dipengaruhi oleh agama Islam. Melalui kontak budaya inilah terjadi pengaruh antara dua bahasa yang digunakan oleh para penuturnya. Islam membawa budaya Arab dengan bahasanya yang menjadi bahasa ibadah yang memengaruhi penulisan *Serat Centhini*. Meskipun demikian, adanya dialek Jawa yang mempunyai karakteristik unik menyebabkan bahasa Arab mengalami perubahan di bidang linguistik. Kajian serupa juga dilakukan oleh Nurnaningsih pada tahun 2016 yang berjudul *Metafora Alat-Alat Seksual, Aktivitas Seksual, dan Dampak Aktivitas Seksual dalam Serat Centhini Karya Pakubuwana V*. Penelitian ini berkesimpulan bahwa seks dalam budaya Jawa bukan sekadar hubungan biologis, tetapi lebih ke arah spiritual. Oleh sebab itu, banyak digunakan metafora. Metafora seks dalam *Serat Centhini* mengajarkan manusia untuk selalu mengetahui makna hidup dan kehidupan. Konsep yang suci dan abstrak akan lebih konkret untuk dipahami jika mempergunakan metafora.

Teks *Centhini* hadir ke dalam ruang-ruang yang sangat jauh dari konsep awal penciptaannya. Lebih-lebih ketika karya ini ditempatkan pada ruang yang magis dan erotis. Secara khusus makalah ini akan membahas kehadiran teks *Centhini* dalam karya sastra, yakni *Centhini putran* oleh Elizabeth D. Inandiak (2008), Sunardian Wirodono (2009), Sri Wintala Ahmad (2010), Ardian Kresna (2013), Soewito Santoso (2013), dan terakhir Sujiwo Tejo (2016). Tujuan makalah ini memetakan kehadiran kembali teks *Centhini* pascareformasi berikut pertarungan wacana yang menyertainya.

Wacana merupakan seperangkat pernyataan yang merujuk kepada objek, tema, atau persoalan tertentu dalam periode historis partikular (Foucault, 2002: 177). Berbagai macam wacana tidak ada yang menjadi pengetahuan tunggal, tetapi pengetahuan akan selalu berbenturan dengan pengetahuan lain melalui wacana (Sarup, 2011: 210).

*Discourse is the means by which institution wield their power through a process of definition and exclusion, intelligibility and legitimacy. What he means by this is the way particular discourse or discursive formation define what it is possible to say on any given topic. A discursive formation consists of a body of unwritten rules, and shared assumptions which attempt to regulate what can be written, thought and acted upon a particular field* (Storey, 2001: 78).

Foucault memformulasi dua metode analisis, yakni metode analisis kritis dan metode analisis genealogi (1981: 70). Kedua metode ini terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan ketika memperbincangkan produksi wacana partikular di zaman tertentu. Analisis kritis bersandar pada prinsip pembalikan, seperti mengungkap bentuk-bentuk *eksklusi*, batasan, apropriasi terkait bagaimana wacana dibentuk, merespons kebutuhan apa, bagaimana mereka dimodifikasi dan digantikan, batasan apa yang mereka gunakan secara efektif, serta dalam hal apa mereka dihindari.

Penelitian akan dimulai dengan mengungkapkan studi pustaka kajian teks *Centhini* secara filologis, linguistik maupun sastra, yang digunakan sebagai data awal. Lalu, dilanjutkan dengan pendataan fenomena kehadiran *Centhini* dalam bentuk-bentuk yang lain, baik seni pertunjukan, media, maupun kegiatan ilmiah. Berikutnya semua data dianalisis dengan paradigma kajian budaya, secara khusus



menggunakan analisis genealogis *Foucault* untuk menghasilkan kajian yang mendalam atas wacana dan kuasa yang terkait dengan teks *Centhini*, yakni terkait dengan kehadiran teks, perkembangan, dan formasi wacananya.

## PEMBAHASAN

Sejak ditemukan korpus tertua *Centhini* pada tahun 1616 M, pertarungan wacana terus berkembang. Hal ini terkait bagaimana teks sebagai wacana digunakan untuk sarana mengembalikan kembali kekuasaan (Haryatmoko, 2016: 26) hingga penulisan teks *Centhini* melahirkan berbagai macam versi. Sampai penelitian ini dilakukan setidaknya ada 98 manuskrip (dalam 180 jilid) dihasilkan di Indonesia maupun di luar negeri. *Centhini* adalah salah satu karya sastra yang berjenis *santri lelana*.

Pada awalnya *Centhini* disalin dengan disiplin ketat karya sastra Islami pesisir. Salah satunya adalah sifat *monometrum* karya sastra. Pada tahapan penyalinan berikutnya, disiplin pesisir ini dilawan oleh penyalin dari pandangan sastra pedalaman dalam hal ini keraton Surakarta. Lahirlah *Centhini Jalalen* pada tahun 1791 (Behrend 1995: 85). Pada saat yang sama pemerintahan kolonial Inggris, mulai memasuki wilayah Mataram tanggal 22 Mei 1812, telah mulai penulisan *History of Java* pada tahun 1811--1816 masehi. Pada masa ini kontestasi wacana mulai meningkat dalam karya-karya Jawa Klasik dan kolonial. *Centhini Kadipaten* lahir pada praperang Jawa tahun 1825--1830. Masa yang sama dengan lahirnya *History of Java* (Raffles: 2008). Denys Lombard (2000: 149), memahami penulisan *Centhini Kadipaten* (1814--1823) sebagai sebuah upaya menghimpun pengetahuan *periferi* atau pinggiran. Tanpa menyebutkan alasan lebih lanjut mengapa Mataram perlu menghimpun pengetahuan periferal pada saat itu. Namun, yang jelas pandangan ini memperkuat kehadiran sebuah naskah sebagai upaya pengembalian kekuasaan keraton Surakarta. Oleh sebab itu, Ann Kumar (1999) mengatakan penulisan *Centhini Kadipaten* dianggap sebagai sebuah karya sastra Jawa yang menyerap semua *genre* sastra abad ke 18 dan 19 (hlm. 487). Teks yang diproduksi tak lepas dari usaha penguatan identitas masyarakat Jawa yang kalah. Pada pemerintahan Sunan Pakubuwono VII, beliau menyalin dan mempersembahkan naskah yang disebut dengan *Centhini Pisungsung* pada tahun 1775 Jawa atau 1846 Masehi (Kartika, 2006: 167).

Penerapan kebijakan politik etis untuk melanggengkan kekuasaan kolonial Belanda juga tecermin dengan pendirian Balai Pustaka, hingga *genre* sastra Jawa berubah dari *metrum tembang* ke novel bergaya Eropa (Suratno, 2003: 39). Pada era Balai Pustaka, *Bataviaasch Genootschap* menerbitkan *Serat Centhini* dalam jumlah banyak ke dalam 4 jilid. Penerbitan ini dianggap paling memenuhi standar, sedangkan penerbitan lain dianggap sebagai sastra picisan. Tentunya di ruang-ruang pinggir terdapat pula teks *Centhini* yang diterbitkan di luar Balai Pustaka, misalnya, *Serat Centhini Yogyakarta* terbitan Kolf Bunning (1909), *Serat Tjentini* terbitan Sadoe Budi Surakarta (1953) dan *Tjentini* terbitan Soiradiradja Jakarta (1954). Dari tiga teks *Centhini* ini ditemukan berbagai varian suntingan bahkan perubahan *metrum* dan bahasa. Pembatasan yang dilakukan oleh institusi, lahirlah karya sastra perlawanan yang *diputrani* bebas di luar standar mayoritas. Teks *Centhini* tidak lagi *bermetrum* macapat, berbahasa Jawa klasik dan penuh dengan makna simbolik. *Negosiasi* yang dilakukan dalam *mutrani* teks *Centhini* juga berlanjut pada era kemerdekaan ditandai dengan penerbitan kembali *Centhini*



*Kadipaten* dalam bahasa Indonesia, dimulai Jilid I--IV (1991) oleh Balai Pustaka, Jilid V--XII (2005) oleh UGM Press.

Berbagai varian teks ini merupakan wujud kebudayaan. Teks *Centhini* berubah dari sisi media, makna, dan ideologi. Selama ini penelitian *Centhini* hanya berdasar pada kajian struktural pada nilai, fungsi praktis dan filosofis. *Centhini* dianggap kekal, universal, suci, dan “final” pada fungsi kultus tradisi. Lebih dari itu, tidak bisa dipungkiri teks *Centhini* lahir pada ruang-ruang yang menarik, mistis, *sporadik* dan simultan. Sejak era kolonial, penyalinan *Serat Centhini* tidak mengikuti kaidah kanon yang baik. *Mutrani* dalam tradisi klasik Jawa tentu tidak terlepas dari konsep estetika *adiluhung*. Sebuah karya sastra Jawa ditulis dengan menggunakan bahasa arkais, penuh filosofis, dan bermetrum (pada masa kekuasaan keraton Surakarta utamanya menggunakan metrum *Macapat*, *Sekar Tengahan*, dan *Sekar Ageng*). Peraturan ketat sebuah *metrum* ini adalah politik kebudayaan keraton Jawa karena sebuah karya sastra mempunyai standar penulisan. Perubahan terjadi pada masyarakat yang kompleks. Sama halnya karya sastra juga mengalami kebutuhan. Perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Balai Pustaka, pelarangan masa Jepang, hingga masa kemerdekaan membuat paradigma kesusastraan berubah. Terlebih pada masa orde baru, totaliter kekuasaan juga berpengaruh kepada kehadiran karya sastra. Karya sastra yang diciptakan dalam orde baru melalui doktrin totalistik dan esensialistik, yakni “kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah”. Oleh sebab itu, *grand design* yang diinginkan adalah kebudayaan yang bersifat utuh, terpadu dan total sehingga karya sastra yang dihasilkan pada masa itu kembali ke masa-masa romantisme. Karya sastra yang tidak mengikuti aturan “negara” dianggap menyimpang bahkan subversif.

Perubahan zaman membuat penulis maupun penyalin membawa tulisan ke dalam bentuk-bentuk baru sehingga terciptalah varian. Varian teks *Centhini* adalah bukti, penyimpangan kanonisitas atas tradisi klasik. Teks-teks *Centhini* yang selalu ditinjau dari segi linguistik, simbolik, dan diskursif akan menciptakan tanda tanya pada kekuasaan dibalik penciptaannya. *Centhini* sebagai entitas pinggiran kebudayaan Jawa, dihadirkan kembali ke dalam bentuk-bentuk yang baru baik novel, puisi, musik, pagelaran teater, wayang, maupun seminar-seminar ilmiah. Hal ini adalah fenomena terkait usaha-usaha mengokohkan kembali kekuasaan tertentu. Berbagai macam konstelasi *mutrani* ini merupakan pertarungan wacana dan kuasa antarteks *Centhini*, maupun dengan teks yang lain. Kehadiran, sistem pelarangan dan formasi diskursif varian teks *Centhini* di era reformasi ini yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### ***Mutrani Centhini* Pascareformasi**

Tahun 1998 merupakan penanda era keterbukaan bangsa Indonesia. Kehadiran kembali teks *Centhini* dalam dunia sastra pascamodern merupakan fenomena menarik. Kelahiran kembali *Centhini Putran* dimulai dengan penulisan *les chants de l'ille a dormir debout - le livre de Centhini* (2002) karya Elizabeth Inandiak. Karya ini kemudian diterjemahkan dari bahasa Prancis ke bahasa Indonesia menjadi empat buku terpisah, yakni *Empat Puluh Malam Satunya Hujan* (2004), *Minggatnya Cebolang* (2005), *Ia yang Memikul Raganya* (2006), dan *Nafsu Terakhir* (2006). Keempat buku itu kemudian dijilid menjadi satu dan diterbitkan dengan judul *Kekasih yang Tersembunyi* (2008). Kelima buku tersebut diterbitkan oleh Galang Press, lalu pada tahun 2015 diterbitkan oleh Kepustakaan Populer



Gramedia. Buku gubahan Elizabeth ini menceritakan berbagai peristiwa pilihan dalam *Serat Centhini* mulai dari Jilid I--XII. Nuansa seksualitas yang dibangun dalam buku pertama cukup menarik banyak pembaca. Kisah yang diangkat dari fragmen lima belas hari pertemuan Amongraga dan Tambangraras di dalam kamar pengantin ini digubah menjadi empat puluh hari oleh Elizabeth Inandiak dengan apik.

*Amongraga telanjang dan duduk besila di hadapan istrinya, di ujung seberang ranjang cukup jauh hingga ketelanjanganannya tidak membuatnya was-was, namun cukup dekat agar Tambangraras dapat memperlihatkan bentuk lingganya setepat-tepatnya* (Tembang 78, hal. 229).

Karya Elizabeth Inandiak ini kemudian diikuti Sunardian Wirodono (2009) yang juga menulis buku *Centhini Sebuah Novel Panjang*. Novel ini awalnya berjudul *Centhini 40 Malam: Mengintip Sang Pengantin*. Buku ini merupakan penceritaan ulang *Centhini* dengan alur mirip buku *Empat Puluh Malam Satunya Hujan* karya Elizabeth Inandiak. Novel gubahan Sunardian Wirodono ini diterbitkan oleh DIVA Press. Selain itu, ia juga menulis *Centhini Dwilingua*. Sri Wintala Ahmad atau Gangsar Bayu Aji menulis tiga buku tentang *Centhini*, yakni: *Centhini, Perjalanan Cinta* (2010), *Centhini, Malam ketika Hujan* (2011) dan *Centhini, Perempuan di Langit Jurang Jangkung* (2012). Trilogi ini secara konsep juga memiliki konsep hampir sama dengan tulisan Elizabeth Inandiak dan diterbitkan oleh DIVA Press. Kedua penulis ini memiliki hubungan yang tidak baik.

Ardian Kresna pada tahun 2013 menulis novel bernafas religius berjudul *Amongraga: Kearifan Puncak Serat Centhini*. Buku ini memuat tentang ajaran-ajaran luhur dalam *Serat Centhini*. Tulisan ini juga diterbitkan oleh DIVA Press.

*Sebelum berangkat esok pagi, biarlah kuberi kau nama baru yang selaras dengan jalan pengembaraanmu itu. Mulai sekarang namamu adalah Amongraga, yaitu manusia yang mengasuh raganya! Insya Allah nama itu akan senantiasa menjadi pelita di saat perjalananmu menuju Sangkan Paran* (hal 36).

Soewito Santoso pada tahun 2013 menggubah *Centhini* ke dalam buku berjudul *Stories from the Serat Centhini: Understanding the Javanese Journey of Life*. Buku ini menceritakan utuh perjalanan dalam *Serat Centhini* disertai foto-foto lokasi yang tercatat dalam *Centhini*. Foto-foto dalam buku ini diambil oleh Fendi Siregar. Secara garis besar penyajian isi buku ini membagi cerita *Centhini* menjadi tiga tahap, yakni masa kecil, dewasa dan tua. Buku ini diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh Marshall Cavendish.

Terakhir Sujiwo Tejo (2016) membuat buku dengan judul *Balada Gathak-Gathuk: Lorong waktu Centhini*. Buku ini diterbitkan oleh Benteng Pustaka. Gathak dan Gathuk merupakan nama santri yang mengikuti Amongraga. Hal ini disebutkan *Serat Centhini* Jilid I yang dikemas dengan banyak tambahan. Karya Sujiwo Tejo ini sangat berbeda dengan alur dan narasi *Serat Centhini*. *Centhini* dalam buku ini digubah dengan esai dan kritik berbagai kehidupan masa kini. Berikut petikannya.

*Pagi mruput itu Gathak-Gathuk menuju ke arah senja. Atas petunjuk tukang Getek di tepi bengawan Sore – ia mengaku Zakia Getek- mereka napak tilas jalan yang pernah dilalui Arya Penangsang* (hlm. 15).



## Pertarungan Wacana

Menurut Foucault (1981), pertama-tama, analisis diarahkan kepada bagaimana pemisahan antara dua hal yang berlangsung dalam teks-teks yang sedang dikaji atau beroperasinya sistem larangan melalui bahasa terkait topik tertentu (hlm. 70). Hal ini dilakukan untuk memahami kejadian-kejadian yang benar-benar khas. Hal ini dimulai dari genealogis struktural teks *Centhini* baik internal teks maupun eksternal teks. *Centhini* gubahan yang di-*putrani* pascareformasi dihadirkan kembali dengan menggunakan bahasa Indonesia, tidak lagi menggunakan bahasa asalnya, yakni bahasa Jawa. Selain itu, bentuknya juga diubah menjadi bentuk baru, yakni prosa, baik novel, esai, dan tulisan ilmiah, tidak lagi menggunakan metrum *macapat*. Gubahan *Centhini putran* tak hanya pada bentuk dan bahasa, tetapi juga pada ide.

Rangkaian diskursif yang dikonstruksi dalam teks akan dihubungkan kembali dengan kontekstual yang mendasarinya. Mengapa *Centhini* yang dipilih? Stigma masyarakat pada *Centhini* umumnya selalu berujung pada “sastra porno”. Oleh sebab itu, ketika buku *Empat puluh malam satunya hujan*, ini menjadi daya tarik sendiri bagi pembaca. Produksi *Centhini* selalu terkait dengan pangsa pasar. Sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk yang berasal dari suku Jawa mengalami kesulitan untuk memahami teks Jawa di abad XIX. *Centhini putran* akhirnya diproduksi dengan bahasa Indonesia. Setiap wacana *Centhini putran* mempunyai segmennya sendiri, dari anak muda yang cenderung takjub dengan wacana seksualitas sampai orang yang suka dengan jenis buku yang terkait religiositas dan budaya *adiluhung*. Pangsa pasar, kapitalisme, dan resistansi budaya tentu menjadi pertimbangan jumlah produksi. Penerbitan ini berpengaruh besar pada proses distribusi wacana. Penerbitan besar seperti Bentang dan Kepustakaan Populer Gramedia ini juga berperan penting dalam pembentukan wacana. Semakin besar modal, semakin besar jumlah cetakan juga memengaruhi distribusi dan pertarungan wacana.

Pembatasan wacana pencipta *Centhini putran* ini adalah usaha untuk menunjukkan temuan-temuan yang diciptakan atau konsep-konsep yang dapat dimainkan. Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana pencipta teks menciptakan komposisi teks *Centhini* (berbagai macam bentuk) dengan menggunakan, memodifikasi, dan menggantikan prosedur repertoar tertentu (sejarah, legenda, autobiografi, dan memoar.) Elizabeth Inandiak dalam buku *Kekasih yang tersembunyi* menambahkan banyak pandangan sufisme dari kajian Zoetmulder, Victor Hugo, dan Fariduddin Attar. Adrian Kresna menggali dari dalam *Serat Centhini* itu sendiri dengan cara mengungkap rangkaian pandangan *Kejawen*. Sujiwo Tejo menambahkan ruang-ruang aktual, disandingkan dengan narasi dalam *Serat Centhini*. Sementara itu, Suwito Santoso menekankan pada pengembaraan tokoh-tokoh di dalam *Centhini* dari masa ke masa.

Ide yang membentuk wacana, dikemas dengan berbagai macam bentuk yang menarik. Elizabeth Inandiak mempunyai gaya penulisan yang puitis dan dekat dengan unsur estetis. Sunardian Wirodono dan Gangsar Bayu Aji memiliki gaya penceritaan yang lebih lugas melalui narasi novelnya. Keunggulan Soewita Santoso terletak pada buku bergambar dan berbahasa Inggris. Hal ini memudahkan wacana diterima oleh dunia internasional.

Bentuk-bentuk lain pernyataan yang diungkapkan dari berbagai macam teks *Centhini*. Pada tahap ini teks *Centhini* selalu membincang wacana dengan sifat tidak pernah netral. Dalam teks *Centhini* produksi wacana juga selalu terkait dengan



peristiwa yang mendukungnya. Pada seni pertunjukan, teks *Centhini* dipentaskan Slamet Gundono (2009) dipentaskan dalam bentuk pagelaran wayang berjudul *Wayang Kondom*. Pagelaran ini berdasar buku *Kekasih yang tersembunyi* dan dipentaskan bersama Elizabeth Inandiak. Selain itu, teks *Centhini* gubahannya pernah menjadi salah satu lirik lagu Jogja Hiphop Foundation (2008) berjudul *Asmaradana 388*. Peristiwa akbar yang mengumpulkan para pakar pengkaji *Centhini* adalah *Borobudur Writer Festival* tahun 2016, sebagai peringatan 200 tahun *Serat Centhini*. Hampir semua penulis gubahan teks *Centhini* menghadiri acara tersebut, kecuali Soewita Santoso. Elizabeth Inandiak menjadi pembicara, penulis lain menjadi peserta. Kehadiran kembali teks *Centhini* juga terkait dengan hasrat kembalinya entitas lokal yang beriringan dengan gerak kapitalisasi dalam dunia sastra.

## PENUTUP

Transformasi teks tradisional ke dalam bentuk baru, yakni entitas nasional dipercaya sebagai langkah awal yang mampu mengokohkan kembali kekuasaan tertentu. Dalam konteks *Centhini*, gubahan ke dalam bentuk prosa dengan bahasa nasional atau internasional dipercaya menumbuhkan rasa cinta kembali pada wacana keagungan kebudayaan Jawa. Di sisi lain, gubahan sastra lama ini juga bisa berbalik arah, hilangnya kesadaran melestarikan kebudayaan daerah, utamanya bahasa dan sastra Jawa. Pertarungan wacana, pengetahuan/kuasa, tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi, politik, dan ideologi yang berlangsung dalam masyarakat. Namun, tetap saja ada sekelompok orang atau kelas yang merasakan keuntungan dari formasi dan praktik diskursif dari bentuk-bentuk lain yang seolah tak ada hubungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sri Wintala. (2012). *Centhini, Perempuan di Langit Jurang Jangkung*. Yogyakarta: Araska.
- Ann Kumar. (1999). "Encyclopedia-izing and the Organization of Knowledge. A Cross-Cultural Perspective". BKI 155 3.
- Bayuaji, Gangsar. (2010). *Centhini, Perjalanan Cinta*. Yogyakarta: Divapress.
- Bayuaji, Gangsar. (2011). *Centhini, Malam Ketika Hujan*. Yogyakarta: Divapress.
- Behrend T.E, dkk. (1990). *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid I Museum Sonobudoyo Yogyakarta*. Jakarta: Djambatan.
- Behrend, T. (1995). *Serat Jatiswara dan Perubahan dalam Puisi Jawa*. Jakarta :INIS 23.
- Dwiyanto, Djoko. (2008). *Ensiklopedi Serat Centhini*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Foucault, Michael. (2002). *Arkeologi Pengetahuan. (Terj. oleh H.M. Mochtar Zoerni)*. Yogyakarta: Qalam.
- Foucault, Michel. (1981). *The Order of Discourse*, Inaugural Lecture at the College de France, 2 Desember 1976, dipublikasikan kembali dalam Robert Young (ed). *Untying the Text: A Post-Structuralist Reader*. Boston: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar Rezim Kepastian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Inandiak, D.Elisabet. (2008). *Kekasih yang Tersembunyi (terj)*. Yogyakarta: Babat Alas.



- Junanah, M.Ag. (2008). *Pengaruh Bahasa Arab dalam Centhini*. Seminar Nasional Mengungkap Kolaborasi Isi dan Peluncuran Saduran Serat Centhini Jilid V-XII, dalam rangka Dies Natalis ke-59 UGM, Yogyakarta 22 Desember 2008.
- Junanah. (2008). *Pengaruh Bahasa Arab dalam Centhini*. Tesis UIN.
- Kamajaya, Karkono. (1991). *Serat Centhini (Suluk Tambangraras) Jilid I-XII*. Yogyakarta: Yayasan Centhini.
- Kamajaya, Karkono. (1988). *Serat Centhini Relevansinya dengan Masa Kini*, ceramah di Balai Pustaka Jakarta. Yogyakarta: Yayasan Centhini.
- Kamajaya Partokusumo, Karkono. (1996). *Serat Centhini sebagai Sumber Inspirasi Pengembangan Sastra Jawa*. Kongres Bahasa Jawa II Batu, Malang. 22-26 Oktober 1996.
- Kresna, Ardian. (2013). *Amongraga: Kearifan Puncak Serat Centhini*. Yogyakarta: Divepress
- Lombard, Denys. (2000). *Nusa Jawa Silang Budaya: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*, Jilid 3. Jakarta: Gramedia.111
- Marsono, dkk. 2005. *Serat Centhini V--XII*. Yogyakarta: Yayasan Centhini.
- Marsono. (2008). *Centhini: Karya Masterpiece Pujangga Jawa*. Seminar Nasional Mengungkap Kolaborasi Isi dan Peluncuran Saduran Serat Centhini Jilid V-XII, dalam rangka Dies Natalis ke-59 UGM, Yogyakarta 22 Desember 2008.
- Marsono, Timbul Haryono, Daru Winarti, dan Suparmo. (1998). *Makanan Tradisional dalam Serat Centhini*. Yogyakarta: Pusat Kajian Makanan Tradisional UGM.
- Munarsih. (2006). *Serat Centhini Warisan Sastra Dunia*. Yogyakarta: Gelombang Pasang
- Muslifah, Siti. (2004). *Serat Centhini Episode Centhini Naratologi dan Pendekatan Gender, Analisis Fabula*. Tesis UGM.
- Nurnaningsih. (2016). *Metafora Alat-Alat Seksual, Aktivitas Seksual, dan Dampak Aktivitas Seksual dalam Serat Centhini Karya Pakubuwana V*. Disertasi UNS.
- Inandiak, D. Elisabet. (2008). *Kekasih yang Tersembunyi*. Yogyakarta: Babat Alas.
- Pigeaud, Th. (1933). *De Cebolang en de Serat Tjentini*. Batavia: *Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootscap*.
- Poerbatjaraka. (1952). *Kapustakan Djawa*. Jakarta: Djambatan.
- Raffles, T.S. (2008). *History of Java (terj)*. Yogyakarta: Narasi.
- Ranggasutrasna, Dkk. (1991). *Centhini: Amongraga-Tambangraras I-IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Santosa, Soewito. (2013). *Stories from the Serat Centhini: Understanding the Javanese Journey of Life*. United Stae: Marshall Cavendish.
- Sarup, Madan. (2011). *Postrukturalisme & Post Modernisme*. Yogyakarta: Jalasutra
- Setyowati, Kartika. (2006). "Centhini dan Erotisme". *Jurnal Ilmiah Kebudayaan*. Tahun ke 4, Vol.4 No.2.
- Soebardi,S. (1975). *The Book of Cebolek* . The Hague: Martiinu Nijhoff.
- Storey, John. (2001). *Cultural Theory and Popular Culture*. London: Pearson.
- Sukenti, Kurniasih. (2002). *Kajian secara Etnobotani terhadap Serat Centhini*. Disertasi IPB.



- Sumahatmaka. (1981). *Ringkasan Centhini (Suluk Tambangraras) Alih Bahasa Sudibyo Z. Hadisutjipto*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Sumidi, Adisasmita. (1975). *Pustaka Centhini Ikhtiar Seluruh Isinya*. Yogyakarta: UP Indonesia.
- Sumidi, Adisasmita. (1974). *Pustaka Centhini Selayang Pandang*. Yogyakarta: UP Indonesia.
- Supriyadi. (2014). *Strukturalisme da Posstrukturalisme*. Yogyakarta: Gress Publishing.
- Suratno, Pardi. (2013). *Masyarakat Jawa dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Adiwacana.
- Tardjan, Hadidjaja & Kamajaya. (1978). *Serat Centhini Dituturkan dalam Bahasa Indonesia Jilid I-A*. Yogyakarta: UP Indonesia.
- Tejo, Sujiwo. (2016). *Balada Gathak-Gathuk: Lorong Waktu Centhini*. Jakarta: Bentang Pustaka.
- Thron, William. (2004). *Penaklukan Jawa*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Tim Penyadur. (1991). *Centhini: Amongraga-Tambangraras I-IV*. Jakarta Balai Pustaka.
- Wahyudi, Agus. (2015). *Centhini Jilid I-XII*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Wirodono, Sunardian. (2009). *Centhini Sebuah Novel Panjang*. Yogyakarta: Diva Press.
- Zoetmulder, PJ. (1939). *Sedikit mengenai Nama Serat Centhini*. Terjemahan R.M. Sarwanto Wiryosaputra. Het Tri Windu Gedenk-boek Mangkunegoro VII.
- Surat Kabar/Majalah:**
- Pardi Suratno. 1991. Desember 14. "Pendidikan Seks Ing Serat Centhini". Djoko Lodang. 20 Prakasa Rakyat, edisi 13 Oktober 2019 Kajawen Edisi 18 April 1939
- Website:**
- <http://www.sastra.org/kisah-cerita-dan-kronikal/68-serat-centhini> diakses 18 Juli 2017
- <http://kedaikibun.com/pementasan-reading-centhini-suluk-tambangraras-agnes-christina/> diakses 10 Mei 2017
- <https://www.indonesiakaya.com/agenda-budaya/detail/borobudur-writers--cultural-festival-tahun-2016> diakses 10 Mei 2017
- <https://killtheblog.com/2008/11/23/asmaradhana-388-serat-centhini/> diakses 12 Agustus 2017.





**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 2 Kelompok 1**

Pembicara : Rendra Agusta, Dwi Susanto, dan Wakit Abdullah Rais  
Judul Makalah : “Tanding Sastra Putran: Sebuah Analisis Wacana Foucault  
terhadap  
Teks *Centhini* Pascareformasi”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.00  
Moderator : Dr. Sastri Sunarti  
Pencatat : 1. Dina Alfiyanti Fasa  
2. Ibnu Kharish

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Ada sekitar 200 naskah cerita *Centhini* dengan sembilan versi cerita.
2. *Centhini* Kadipaten merupakan versi paling awam yang dikenal masyarakat. Versi ini ditulis selama kurang lebih sembilan tahun.
3. Karya sastra yang beredar di zaman Orde Baru dibatasi, tetapi setelah Orde Baru banyak karya sastra pinggiran yang muncul.
4. Ada banyak cerita *Centhini* yang dihasilkan di era pascareformasi dalam bentuk novel, teater, dsb.
5. Penelitian terdahulu yang mengkaji cerita *Centhini* hanya mengangkat seksualitas dan analisis gender.
6. Dalam cerita *Centhini* yang beredar di era pascareformasi, beberapa hal yang ditemukan dalam cerita adalah cerita ditulis dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing serta tidak bermetrum.
7. *Centhini* mengungkapkan pandangan seksualitas dan mengungkapkan pandangan spiritual “*pinggiran*”.
8. Pertarungan wacana lokal juga beriringan dengan gerak kapitalisasi, termasuk dalam dunia sastra. Keduanya membentuk formasi dan praktik diskursif dalam wilayah kultural masing-masing. Dalam era reformasi tidak menutup kemungkinan lahirnya wacana-wacana independen, fragmentatif, mistis, dan ahistoris.
9. *Centhini* pascareformasi mayoritas berpatokan pada *Serat Centhini* Kadipaten.
10. *Centhini* Pisunsun merupakan *Centhini* Kadipaten yang memiliki dua belas jilid dengan muatan seksual cukup banyak.
11. *Serat Centini* di era reformasi semuanya dianggap benar. Yang paling banyak adalah mengenai seksualitas.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Rizki Abrian  
Instansi : Universitas Airlangga



**Pertanyaan:**

Apakah *Serat Centhini* yang kelima hingga kedua belas diserahkan kepada Belanda sebagai hadiah untuk menyenangkan mereka?

**Jawaban:**

*Serat Centhini* kemungkinan tidak dijadikan sebagai hadiah karena ada beberapa karya lain yang dijadikan sebagai hadiah. Ada motif-motif lain yang dilakukan oleh Belanda.

**Penanya 2**

Nama : Prih Suharto

Instansi : Badan Bahasa

**Pertanyaan:**

Seks itu menurut Faucault pernah didomestikasi. Masa pascareformasi itu sangat kacau. Kita tahu bahwa saat Orde Baru menikah saja harus ada undang-undangnya. Ketika Pak Harto turun, semua yang aneh-aneh itu muncul kembali. Siapa kemudian yang memoralisasi hal tersebut?

**Jawaban:**

Dalam temuan saya, *Centhini* dieksploitasi untuk bagian seksualitasnya. Kelahiran *Centhini* paling kuat itu dilatarbelakangi ekonomi. Penerbit-penerbit besar itu laris karena mengeksploitasi seksualitas *Centhini*. Kalau untuk merayakan kebebasan, itu bukan faktor utama dalam penulisan *Centhini*. Versi cerita *Centhini* yang paling lengkap adalah buku Elizabeth dan Suwito. Konsep malam pertama yang terbaik adalah saat bulan purnama. Namun, oleh Elizabeth konsep itu digubah menjadi angka 40 daripada angka 15. Saat penerjemahan ke dalam bahasa Prancis itu banyak sekali perubahan karena akan dicetak di Indonesia.

**Isu-Isu Penting:**

Isu seksualitas dalam karya sastra sudah tidak lagi tabu untuk dibicarakan.





## **F. SUBTEMA 6: BAHASA SEBAGAI SARANA PERTAHANAN KEAMANAN, PERDAMAIAN SERTA PEMBANGUNAN**

### **1. Bahasa sebagai Sarana Pertahanan, Keamanan, Perdamaian, serta Pembangunan**

Judul : Bahasa sebagai Sarana Pertahanan, Keamanan, Perdamaian, serta Pembangunan  
Pembicara : Eko Sulistyio  
Jabatan : Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 15.45—17.45  
Moderator : Dr. Maryanto

Bahasa Indonesia dalam konteks sekarang ini adalah bahasa pemersatu bangsa. Sejak awal kedudukannya, bahasa Indonesia menumbuhkan proses sosial budaya dan politik yang menjadi sikap bersama sebagai sebuah bangsa. Proses awal pembentukan sosial budaya dan politik ini kemudian menjadi cerminan dari sikap kebangsaan untuk memajukan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, sebagai produk sosial budaya ini, saya membuat catatan bahwa bahasa Indonesia memiliki beberapa karakter. *Pertama*, bersifat inklusif dan terbuka, berbagai bahasa daerah dan bahasa asing menjadi bahasa serapan, kemudian menjadi bahasa Indonesia yang sekarang ini. Jika dilihat dari prosesnya, sejarah terbentuknya bahasa Indonesia itu bukan berdiri sendiri, tetapi atas komunikasi, pergaulan, interaksi, dan persatuan dengan bahasa-bahasa lain. Hal inilah yang dikatakan bahwa bahasa Indonesia bersifat inklusif dan terbuka. Oleh karena itu, ide pemurnian bahasa merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip inklusif. Pemurnian bahasa Indonesia akan bertentangan dengan proses sejarah pembentukan bahasa Indonesia yang bersifat terbuka. Bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang dinamis dan hidup dengan sifat inklusif.

Dalam proses, sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakanginya, bahasa Indonesia memiliki karakternya bersifat pluralis, bisa menerima perbedaan dan keragaman seperti dalam prosesnya, berinteraksi antara bahasa-bahasa dari daerah, kemudian juga berinteraksi dengan bahasa-bahasa dari negara asing atau serapan dari negara asing. Oleh karena itu, saya katakan karakter *kedua* bahasa Indonesia bersifat pluralis dan bisa menerima perbedaan dan keragaman sebagai suatu kekayaan dari bangsa Indoensia. Dalam KBBi merupakan cerminan dari sebuah kebhinekaan, dalam konteks proses sosiologisnya adalah pencerminan dari keberagaman yang menjadi legasi dari bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia akan terus berkembang karena pluralitas itu, karena memang objektifnya lahir di tengah bangsa yang plural. oleh karena itu sifat pluralitas merupakan roh dari bahasa Indonesia, maka tanpa pluralisme, bahasa Indonesia ibarat badan tanpa jiwa.

Karakter *ketiga*, bersifat demokratis dan egaliter. Semua orang dari status sosial, latar belakang, suku, agama dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan sesama anggota masyarakat. Tidak ada hierarki sosial di dalam penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, jika kita menengok ke belakang pada era kolonial misalnya, bagaimana stratifikasi sosial yang feodal, kolonial, dan hierarkis, bahkan rasis karena ada penggolongan masyarakat-



masyarakat tertentu. Selain itu, bahasa juga menjadi alat kontrol dan status sosial. Pada masa kolonial, bahasa Belanda dijadikan sebagai alat komunikasi utama dalam birokrasi pemerintahan. Dalam sistem feodal, masyarakat kaum elite atau priyai sering menggunakan bahasa Jawa *ngoko* dalam teks-teks narasi media atau koran di media era abad XX. Hal tersebut memunculkan gerakan di Jawa yang disebut Jawa Dwipa dan sebagainya. tetapi bahasa melayu sebagai ibu dari bahasa Indonesia sebagai lintas suku, lintas agama, lintas sara. pada masa kolonial menyebabkan bahasa Indonesia memiliki dasar/unsur kemanusiaan karena semua manusia menjadi setara dengan penggunaan bahasa Indonesia. Dalam strata masyarakat feodal di Jawa, tataran atau tingkatan dengan bahasa sudah menunjukkan status sosial tertentu. Seorang ningrat atau bangsawan tertentu akan menggunakan bahasa *krama* saat bertutur, sedangkan masyarakat biasa akan menggunakan bahasa *ngoko*. Penggunaan bahasa juga menunjukkan identitas status ataupun kelas sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, di hadapan bahasa Indonesia, manusia memiliki kesetaraan. Dimensi kemanusiaan dalam konteks bahasa Indonesia menjadi hal yang sangat penting.

*Keempat*, bahasa Indonesia memiliki sifat pemersatu bangsa. Kehadiran bahasa Indonesia bisa diterima oleh semua daerah, wilayah, lintas agama, lintas etnis, lintas orang desa, orang kampung, orang kota, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, konteks atau klu ini tidak lepas dari sejarah pembentukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang terbentuk dari bahasa melayu yang sudah menjadi *lingua franca*, semacam bahasa pergaulan yang dimiliki oleh anak suku bangsa sebelum kemerdekaan. Proses penerimaan dari bahasa Melayu menjadi bahasa pergaulan dipercepat oleh kehadiran modernitas. Salah satunya adalah penemuan mesin percetakan yang memungkinkan orang dapat menerbitkan hasil-hasil percetakan. Penggunaan *lingua franca* bahasa melayu dalam media-media penerbitan dipelopori terbitnya karya-karya sastra Tiongkok. Robin Salmon dalam karyanya menyebutkan bahwa penggunaan bahasa melayu orang menjadi tak terbatas, bisa membayangkan sesuatu meskipun lintas, dipisahkan lautan dan daratan, antardaerah, kemudian bisa membayangkan satu komunitas keindonesiaan yang disebut oleh peneliti kebudayaan dan bahasa sebagai *Imagine community*. Oleh karena itu, perkembangan kapitalisme cetak juga memengaruhi proses penyebaran bahasa melayu *lingua franca*. Kemudian, meresap segala informasi keterbukaan dan modernitas yang diterima atau dirasakan oleh para kaum muda yang sedssng mengalami proses pembentukan kesadaran. Dalam konteks pembentukannya, bahasa Indonesia memiliki karakter pembentuk kesadaran dan ekspresi nasionalisme. Bahasa Indonesia juga menjadi pencerminan pembentukan kesadaran sebagai sebuah bangsa. Ide-ide modern, termasuk yang diterima oleh para kaum pergerakan, pada era kemunculan sastra, karya sastra, atau surat kabar sangat berkaitan dengan kaum pergerakan. Hal ini, juga yang menjadi faktor yang melatar belakangi munculnya pencetus surat kabar pribumi yang juga seorang penggagas pergerakan kebangsaan. Takashi dengan disertasinya menyebutkan bahwa pada zaman pergerakan, karya sastra dan surat kabar adalah bagian terpenting dari era baru tentang pergerakan nasional. Mereka menggunakan instrumen-instrumen karya-karya sastra media itu sebagai senjata baru pada era modern. Kaum elite muda terpelajar mendalami dan mempelajari instrumen-instrumen baru melalui kapitalisme cetak berbahasa Indonesia. Dalam konteks historis sosial budaya, pembentukan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa jelas kekuatannya.



Oleh karena itu, keinginan kelompok-kelompok masyarakat atau keinginan siapa pun yang antipluralisme, antikebinekaan, antiinklusifme akan menjadi ancaman terhadap perjalanan bahasa Indonesia.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Eko Sulistyio  
Judul Makalah: “Bahasa sebagai Sarana Ketahanan, Keamanan, dan Perdamaian serta Pembangunan”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 15.45—17.45  
Moderator : Dr. Maryanto  
Pencatat : 1. Ambiya Ikrami Adji  
2. Dewi Khairiah  
3. Retno Indarwati

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Sejak kelahirannya, bahasa Indonesia bahkan dalam konteks saat ini adalah bahasa pemersatu bangsa. Proses sosial, budaya, dan politik menjadi cerminan sikap kebangsaan dalam memajukan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Karakter bahasa Indonesia:
  - a) Bersifat inklusi dan terbuka. Bahasa Indonesia tidak terbentuk oleh diri sendiri, tetapi juga oleh sentuhan dan interaksi dengan bahasa lainnya, seperti bahasa daerah dan asing. Jika ada keinginan untuk memurnikan bahasa Indonesia, hal tersebut bertentangan dengan sejarah karena bahasa Indonesia bersifat terbuka.
  - b) Bersifat pluralis. Bahasa Indonesia dapat menerima perbedaan dan keragaman, seperti proses interaksinya dengan bahasa daerah dan asing.
  - c) Bersifat demokratis dan egaliter. Semua orang dari berbagai latar belakang dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk sarana komunikasi. Tidak ada hierarki sosial dalam penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki unsur kemanusiaan karena dengan menggunakan bahasa Indonesia masyarakat menjadi setara. Berbeda dengan bahasa daerah yang memiliki bahasa yang berbeda sesuai status sosialnya, misalnya bahasa Jawa.
  - d) Bersifat pemersatu bangsa. Kehadiran bahasa Indonesia dapat diterima oleh semua suku, agama, dan budaya.

**Tanya Jawab**

**Penanya**

Nama : Mahmudah  
Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar

**Pertanyaan:**

Apa langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk menunjukkan jati diri bahasa Indonesia?

**Jawaban:**

Rekomendasi dari kongres ini dapat mendorong kementerian untuk mengupayakan agar bahasa Indonesia dapat lebih diterima di dunia internasional.



**Isu-Isu Penting:**

1. KBBI merupakan cerminan dari sebuah kebinekaan, keberagaman dari legasi bangsa Indonesia.
2. Kementerian dapat mengupayakan dan mengembangkan bahasa Indonesia agar dapat diterima di dunia internasional.





## 2. Bahasa sebagai Sarana Pertahanan, Keamanan, Perdamaian, serta Pembangunan

### PENGELOLAAN, PENGINTEGRASIAN, DAN PEMANFAATAN DATA BAHASA DAN SASTRA DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBAHASAAN YANG BERKEINDONESIAAN

**Mahsun**

Universitas Mataram  
mahsunirn@gmail.com

#### **Abstrak**

Indonesia merupakan negara yang nasionalisme dibangun di atas fondasi bahasa, bukan di atas fondasi kesamaan ras/suku bangsa atau agama. Oleh karena itu, keragaman data kebahasaan harus dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan dan implementasi kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan. Makalah ini membahas hal yang berhubungan dengan wujud, pengelolaan, dan pengintegrasian serta pemanfaatan data kebahasaan sebagai bahan perumusan kebijakan kebahasaan serta implementasinya dalam rangka membangun kemandirian bangsa melalui: (a) penguatan peran bahasa negara, (b) penguatan peran bahasa lokal/daerah, dan (c) pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan.

**Kata-kata kunci:** nasionalisme, ras, suku bangsa

#### **Abstract**

*Indonesia is a nationalism country built on the basis of language, not on race, ethnicity or religion. Therefore, the variety of languages should be managed well and used as a source to formulated and implement the indonesia-language policy. This paper discusses matters relating to form, management, integration, and the implementation of language policy as a source to formulate language policy and the implementation to nation building independence through: (a) strengthening the national language role, (b) strengthening the role of local languages, and (c) developing language strategy and diplomacy*

**Keywords:** *nationalism, race, ethnicity*

#### **LATAR BELAKANG**

Ketika berbicara negara bangsa, maka yang terlintas dalam alam pikiran kita adalah penyatuan berbagai komunitas/suku bangsa yang berbeda dalam satu kesatuan sistem ideologi, teritori, politik/pemerintahan, pertahanan, dan sosial serta budaya. Sementara itu, penyatuan tersebut hanya mungkin terwujud jika antarkomunitas/suku bangsa yang berbeda-beda itu memiliki benang-benang pengikat yang dapat mempersatukan mereka. Terdapat tiga elemen yang dapat dipilih untuk menjadi benang pengikat atau landasan yang dapat mempersatukan berbagai komunitas/suku bangsa dalam satu kesatuan negara bangsa atau nasionalisme negara bangsa, yaitu ras/suku bangsa, agama, dan bahasa (Anwar, 2008). Terdapat banyak contoh negara bangsa yang nasionalismenya dibangun di atas fondasi ras, misalnya negara-negara di Afrika, seperti Afrika Selatan. Jika elemen ras yang dipilih, betapa sulit bangunan nasionalisme Indonesia akan ditegakkan. Bayangkan, jika berpatokan pada bahasa sebagai penanda identitas ras (suku bangsa), suku bangsa manakah yang dipilih sebagai representasi



keindonesiaan negara bangsa Indonesia? Suatu pilihan yang sangat sulit, boleh jadi pilihan itu justru menempatkan cita-cita membangun NKRI hanya angan-angan.

Pada kisaran tahun 1970-an sampai dengan tahun 1988, para perekayasa bahasa melalui institusi kebahasaan Badan Bahasa melakukan gerakan memperkaya daya ungkap bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa modern yang sejajar dengan bahasa dunia lainnya. Gerakan tersebut dilakukan dengan banyak menyerap kosakata bahasa Jawa sehingga muncul kritikan yang menyatakan, “Telah terjadi proses penjawaan dalam bahasa Indonesia”. Kritikan tersebut menggambarkan tolakan dominasi suku bangsa tertentu dalam membangun keindonesiaan. Artinya, elemen suku bangsa atau ras tidak mungkin menjadi fondasi dalam membangun nasionalisme Indonesia. Begitu pula dengan elemen agama, ada banyak negara bangsa yang menjadikan agama sebagai elemen pengikat nasionalismenya. Bahkan, nama agama dijadikan nama negaranya, misalnya Republik Islam Iran, yang menjadikan agama Islam sebagai fondasi dalam membangun nasionalisme negara bangsanya. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Persoalannya, agama manakah yang akan menjadi fondasi atau benang pengikat dalam membangun nasionalisme keindonesiaan. Katakanlah, Islam dipilih karena agama ini adalah agama mayoritas. Pengalaman sejarah ketika rumusan sila pertama Pancasila di dalam Piagam Jakarta yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” tujuh kata terakhir pada redaksi sila pertama itu diubah menjadi bunyi sila pertama Pancasila seperti yang dikenal sekarang, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini telah memberikan pelajaran kepada bangsa ini bahwa betapa arifnya para pendiri bangsa untuk tidak memilih agama sebagai fondasi dalam membangun negara bangsa Indonesia. Itu sebabnya pula, sehebat apa pun gerakan yang ingin mengganti fondasi nasionalisme Indonesia dengan agama pasti akan mendapat tolakan yang kuat, seperti gagalannya gerakan separatis DI/TII yang ingin membentuk negara agama.

Pemilihan bahasa sebagai sebagai fondasi dalam membangun nasionalisme negara bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang menarik. Hal itu terlihat dari pengakuan atas kesatuan tanah air, yaitu tanah air Indonesia meskipun terdiri atas tidak kurang 17.000 tanah air (pulau) dan kesatuan bangsa meskipun terdiri atas tidak kurang dari 659 (suku) bangsa. Berbagai suku bangsa yang mendiami tujuh belasan ribu pulau tersebut diyakini mampu direkatkan dengan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya, bahasa menjadi benang pengikat dalam membangun nasionalisme Indonesia. Dalam konteks ini, pengakuan mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yeuw dalam bukunya *One Man’s View of the World*, yang menyatakan bahwa ketika runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998, tidak ada satu orang pun pejabat di negara itu yang tidak meramalkan di Indonesia akan terjadi balkanisasi, menjadi amat penting dan benar. Indonesia akan hancur berkeping-keping menjadi negara-negara kecil, seperti asalnya dari beberapa ratus negara bangsa yang berupa kerajaan atau kesultanan. Namun, ramalan itu jauh dari kebenaran. Lalu, apa yang membuat Indonesia masih bertahan seperti sekarang ini? Lee Kuan Yeuw menjawabnya dengan menyatakan bahwa Indonesia telah diwarisi satu hal yang tidak ternilai oleh para pendiri bangsanya, yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam konteks itulah bahasa nasional, bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam



membangun nasionalisme keindonesiaan. Namun demikian, tidak hanya bahasa Indonesia yang menjadi elemen pembentuk nasionalisme keindonesiaan, tetapi bahasa-bahasa lokal pun memiliki peran yang tidak kalah penting dalam membentuk nasionalisme keindonesiaan. Hal itu terungkap dari penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa “Bahasa negara adalah bahasa Indonesia”, adapun: “Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara oleh negara...” Penjelasan Pasal 36 UUD 1945 tersebut menggambarkan bahwa nasionalisme keindonesiaan tidak hanya dibangun di atas bahasa nasional, tetapi juga di atas bahasa-bahasa lokal. Apabila bahasa Indonesia merefleksikan keberagaman dalam kesatuan (pilar NKRI), bahasa-bahasa lokal merefleksikan kesatuan dalam keberagaman (pilar Bhinneka Tunggal Ika). Bahkan, sebegitu pentingnya keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa lokal dalam membangun nasionalisme negara bangsa Indonesia, Mahsun (2015), mengusulkan elemen bahasa tidak hanya sebagai elemen pembentuk nasionalisme keindonesiaan, tetapi juga menjadi salah satu pilar dari empat pilar negara bangsa Indonesia, yaitu UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Bahasa itu sendiri yang berdiri kokoh di atas fondasi negara, yaitu Pancasila.

Sebagai negara bangsa yang dibangun di atas fondasi nasionalisme bahasa, Indonesia juga mengalami “gempuran” dari bahasa dalam konteks perang konsepsi/ideologi (*proxy war*). Berbagai isu kebahasaan yang dihubungkan dengan politik kebangsaan, seperti yang muncul di kawasan timur Indonesia dengan isu kemelanesiaannya, di kawasan barat Indonesia dengan isu kemelayuannya, dan kawasan tengah Indonesia dengan pemanfaatan isu otonomi daerah, memberikan gambaran kepada bangsa Indonesia betapa bangsa ini haruslah mengelola secara arif keberagaman bahasanya dalam satu kebijakan strategis kebahasaan demi keutuhan NKRI. Dengan kata lain, diperlukan upaya pengelolaan dan pemanfaatan data kebahasaan (bahasa dan sastra) dalam rangka pengembangan dan implementasi kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini dapat dirumuskan berikut:

- a. Bagaimanakah wujud data kebahasaan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan dalam merumuskan kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan?
- b. Bagaimanakah mengelola data kebahasaan (bahasa dan sastra) bagi perumusan kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan?
- c. Bagaimanakah memanfaatkan data kebahasaan dalam implementasi kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan?

## **IHWAL KEBIJAKAN KEBAHASAAN YANG BERKEINDONESIAAN**

Kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan yang dimaksud dalam makalah ini adalah arah pembangunan bidang kebahasaan yang dapat menjadi salah satu penopang bangunan negara Indonesia yang memiliki kemandirian/kedaulatan sebagai sebuah negara bangsa yang keberadaannya diakui negara bangsa lainnya. Sementara itu, kemandirian bangsa, yang dimaknai sebagai hal atau keadaan mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, mempersyaratkan bahwa negara bangsa itu



dapat tampil sebagai sebuah negara bangsa dengan keutuhannya, yang tidak hanya menyangkut keutuhan dari aspek teritorial, ekonomi, pertahanan, politik, sosial, dan budaya, tetapi juga menyangkut keutuhan sebagai sebuah komunitas negara bangsa yang memiliki identitas/jati diri. Salah satu identitas dan jati diri itu adalah bahasa, baik itu bahasa negara maupun bahasa daerah (Mahsun, 2015).

Sebagai negara bangsa yang dibangun di atas fondasi bahasa, maka pemanfaatan potensi kebahasaan untuk menegakkan kemandirian bangsa Indonesia perlu mendapat perhatian, yang dalam hal ini tidak hanya bahasa negara, tetapi juga bahasa-bahasa lokal atau daerah. Kebijakan penanganan segala potensi bahasa tersebut hendaknya ditempatkan pada kedudukan dan fungsi tiap-tiap jenis bahasa yang dirumuskan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009.

Dalam hubungannya dengan bahasa negara, penguatan peran bahasa Indonesia baik di dalam negara ataupun di luar negara haruslah diletakkan pada kerangka berpikir menghadirkan negara dalam negara itu sendiri dan menghadirkan negara di negara lain dalam tata pergaulan global. Strategi operasionalnya haruslah menyentuh aspek psikologis warga negara Indonesia yang dapat menumbuhkan keyakinan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa dalam bahasa Indonesia hadir keindonesiaan itu sendiri. Peran-peran historis bahasa Indonesia dalam membangun keindonesiaan hendaknya senantiasa menjadi kompas dalam berperilaku setiap warga negara Indonesia. Begitu pula kehadiran bahasa Indonesia di luar negara membuktikan kehadiran negara dalam percaturan dunia global. Kebijakan utama yang dapat dilakukan dalam rangka memperkuat kehadiran negara di dalam atau di luar negara adalah melalui kegiatan pendidikan serta penguatan kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan dengan jalur partisipatori.

Selanjutnya, bahasa lokal/daerah memainkan peran yang sangat penting dalam membangun keindonesiaan. Melalui bahasa-bahasa lokal, keberadaan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika mampu dirunut secara maknawi. Boleh jadi, kehilangan satu saja bahasa daerah tertentu yang memiliki peran penjelas dan memperantarai relasi kekerabatan bahasa-bahasa daerah yang lain, berarti kehilangan mata rantai yang sangat berharga bagi penjelasan makna kebinekaan dalam ketunggalikaan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, jika tidak ditemukan bukti-bukti kebahasaan dalam bahasa Namblong dan Kafoa di Papua, akan menjadi sangat sulit untuk menjelaskan keterhubungan antara bahasa Tarfia dan bahasa Tobati dengan bahasa Gresi (Mahsun, 2015). Artinya, kajian-kajian strategis yang berhubungan dengan jumlah bahasa dan variannya, relasi kekerabatan antarbahasa daerah, interaksi antarkomunitas tutur bahasa daerah yang tecermin lewat bahasa, kesepadanan adaptasi sosial antarkomunitas tutur bahasa daerah yang tecermin dalam bahasa yang digunakannya, loyalitas bahasa dalam hubungannya dengan loyalitas kewarganegaraan masyarakat di wilayah perbatasan, cara pandang masyarakat tutur bahasa daerah dalam memandang keberadaannya, dan keberadaan komunitas tutur bahasa daerah lain yang tecermin dalam bahasa yang digunakan mutlak dilakukan untuk merumuskan kebijakan pembangunan bangsa dari aspek kebahasaan. Oleh karena itu, terkait dengan pemaparan aspek peengelolaan dan pemanfaatan data kebahasaan dalam pengembangan dan pengimplementasian kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan dalam makalah ini ditujukan untuk

- a. membangun kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa Indonesia;
- b. membangun kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa lokal/daerah;



- c. membangun kemandirian bangsa melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan.

## **PEMBAHASAN**

### **Wujud dan Pengelolaan Data Kebahasaan**

Kemunculan berbagai subbidang dalam linguistik/ilmu bahasa dan ilmu sastra pada dasarnya menuntun pada kenyataan bahwa terjadinya berbagai sudut pandang dalam melihat data bahasa dan sastra. Dalam linguistik terdapat pembagian bidang/subbidang keilmuan atas linguistik mikro, linguistik makro (Kridalaksana, 2008). Dalam bidang linguistik mikro terdapat subbidang fonologi, morfologi, sintaksis, teks, dan semantik; sedangkan untuk bidang linguistik makro terdapat di subbidang interdisipliner. seperti sociolinguistik, antropinguistik/linguistik kebudayaan, genolinguistik, linguistik diakronis, dan lain-lain. Dalam bidang linguistik mikro, subbidang fonologi memfokuskan diri pada data kebahasaan yang menyangkut elemen terkecil bahasa, yaitu bunyi, suku kata, dan kata; subbidang morfologi memfokuskan diri pada data yang berupa morf, morfem bebas, morfem terikat, dan proses-proses pembentukan kata; subbidang sintaksis memfokuskan diri pada data kebahasaan yang berada di atas kata, seperti frasa, klausa, dan kalimat; subbidang teks atau waacana memfokuskan diri pada satuan bahasa di atas kalimat, seperti paragraf dan teks itu sendiri serta satuan-satuan gramatis yang berupa konjungsi penghubung antarkalimat dalam membentuk paragraf dan penghubung antarparagraf dalam membentuk teks; subbidang semantik adalah subbidang yang memfokuskan diri pada makna satuan-satuan bahasa, mulai dari satuan morfemis terkecil yang mengandung makna sampai pada satuan kebahasaan terbesar. Dalam bidang linguistik makro, seperti subbidang sociolinguistik memfokuskan diri pada variasi kebahasaan yang disebabkan faktor sosial (Hudson, 1998); subbidang linguistik kebudayaan memfokuskan diri pada kajian bahasa dalam hubungannya dengan budaya, seperti kajian tentang konsep ruang, waktu, sistem kekerabatan, konsep tentang warna dan lain-lain. (periksa, Foley, 1998 dan Brundi, 1997), subbidang linguistik diakronis yang di dalamnya terdapat subbidang dialektologi diakronis dan linguistik historis komparatif. Kedua subbidang linguistik diakronis ini sama-sama mengkaji variasi bahasa, tetapi bedanya variasi bahasa yang dikaji dalam dialektologi diakronis adalah variasi dialektal, yaitu variasi yang terdapat dalam satu bahasa; sedangkan variasi bahasa yang dikaji dalam linguistik historis komparatif adalah variasi bahasa yang berada pada tingkat isolek yang disebut bahasa, jadi bersifat variasi antarbahasa yang berkerabat. Selain itu, keduanya bertujuan akhir merekonstruksi bahasa purba yang menurunkan varian-varian tersebut (Mahsun, 1995 dan 2010). Adapun subbidang genolinguistik merupakan kajian yang memadukan hasil analisis secara genetis dan linguistik penutur bahasa serta bahasa yang diperbandingkan dengan tujuan untuk menentukan relasi kekerabatan populasi penutur bahasa-bahasa tersebut (Mahsun, 2010). Patut ditambahkan bahwa unit kebahasaan yang menjadi pusat perhatian atau yang menjadi data kebahasaan dalam linguistik makro/interdisipliner di atas adalah unit-unit kebahasaan yang menjadi fokus kajian linguistik mikro, hanya penjelasannya diberikan atas dasar perspektif bidang ilmu yang menjadi mitra kajian linguistik interdisipliner tersebut, misalnya terjadinya perbedaan leksikal untuk merealisasikan makna yang sama dalam suatu bahasa dengan memberikan penjelasan dari aspek sosial masyarakat, seperti munculnya sistem tingkat tutur



dalam bahasa Jawa, Bali, Sasak, dan lain-lain atau munculnya perbedaan konsep waktu antara bahasa tertentu dan bahasa lain yang diberikan penafsiran dari aspek cara masyarakat itu memandang keberadaan manusia dalam dimensi waktu, seperti yang dilakukan dalam kajian linguistik kebudayaan (Mahsun, 2009).

Selanjutnya, dalam bidang ilmu sastra terdapat subbidang yang mengkaji bentuk karya sastra dari segi struktur internal pembentuk suatu karya sastra, seperti yang dilakukan dalam kajian ilmu sastra murni, di samping ada kajian berupa deskripsi bentuk-bentuk ekspresi sastra yang muncul dalam masyarakat tutur bahasa tertentu, misalnya deskripsi bentuk-bentuk ekspresi sastra yang menggunakan medium bahasa Bali, Sasak, Jawa dan lain-lain, selanjutnya dihubung-bandingkan satu sama lain untuk menelusuri asal persebaran bentuk ekspresi sastra tertentu yang memiliki pertalian historis. Data kebahasaan dan hasil olahan yang dilakukan melalui pemanfaatan perspektif bidang/subbidang ilmu bahasa dan ilmu sastra yang digambar secara sepintas di atas tentu sangat bermanfaat dalam menentukan kebijakan serta implementasi kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan. Sebagai contoh, data kebahasaan yang berupa hasil kajian fonologi dapat dikelola menjadi bahan pengembangan sistem tata tulis/aksara dalam bahasa tersebut; data kebahasaan yang berupa hasil kajian morfologi, sintaksis, semantik, dan teks dapat dikelola menjadi bahan pengembangan tata bahasa bahasa tersebut; data kebahasaan hasil kajian subbidang interdisipliner linguistik, seperti sosiolinguistik, antropolinguistik/linguistik kebudayaan dapat dikelola menjadi bahan pemahaman akan interaksi sosial dan cara pandang masyarakat penutur bahasa tersebut; data kebahasaan hasil kajian genolinguistik dapat dikelola menjadi bahan pemahaman akan keberagaman suku bangsa tidak hanya tecermin dalam keberagaman bahasa dan gen, tetapi juga berasal dari asal yang sama. Sementara itu, pemanfaatan hasil pengelolaan yang dapat dikembangkan menjadi bahan pemahaman keberagaman suku bangsa tersebut merupakan hasil kajian ilmu sastra, khususnya sastra bandingan historis. Semua hasil pengelolaan data kebahasaan tersebut dapat menjadi bahan dalam membangun kemandirian bangsa melalui kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan, khususnya melalui jalur pendidikan. Adapun bahan yang berupa hasil pengelolaan yang berupa sistem tata tulis dan bahasa dapat menjadi materi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas berbahasa, sedangkan bahan pengelolaan yang berupa keberagaman bahasa dan gen, termasuk keberagaman ekspresi sastra pada setiap komunitas tutur bahasa tertentu dapat menjadi bahan pembelajaran pembentukan karakter yang berkeindonesiaan. Secara jelas, ihwal pemanfaatan hasil pengelolaan data kebahasaan di atas dipaparkan dalam seksi berikut ini.

#### **PEMANFAATAN DATA KEBAHASAAN DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBAHASAAN YANG BERKEINDONESIAAN**

Data kebahasaan yang dimaksud di sini tidak hanya menyangkut data kebahasaan bahasa dan sastra Indonesia, tetapi juga menyangkut data kebahasaan bahasa dan sastra daerah. Selain itu, tidak semua data kebahasaan yang menyangkut berbagai aspek atau bidang kajian kebahasaan yang akan dibahas di sini, tetapi beberapa saja yang menjadi contoh perumusan dan implementasi kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan. Oleh karena itu, dalam seksi ini akan



dipaparkan ihwal pemanfaatan data kebahasaan dalam rangka perumusan dan implementasi kebijakan yang bertujuan untuk

- a. membangun kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa Indonesia;
- b. membangun kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa lokal/daerah;
- c. membangun kemandirian bangsa melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan.

Pembahasan ketiga hal tersebut dipaparkan secara berturut-turut dalam seksi-seksi berikut ini.

## **PEMANFAATAN DATA KEBAHASAAN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI PENGUATAN PERAN BAHASA INDONESIA DI DALAM NEGARA**

Seperti yang diketahui bersama bahwa negara-negara bangsa yang memiliki peradaban unggul dengan keunggulan ekonominya diawali dari politik identitas, yang selanjutnya identitasnya disebar ke luar negara setelah bangunan fondasi dalam negaranya mapan. Oleh karena itu, kehadiran negara yang ditandai kehadiran bahasa negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mampu menjaga keutuhan teritorial, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan, serta pertahanan bangsa. Mengapa demikian? Karena bahasa nasional atau bahasa negara bagi suatu negara bangsa merupakan identitas negara bangsa tersebut, termasuk negara bangsa Indonesia dengan bahasa nasional atau bahasa negaranya bahasa Indonesia. Sebagai identitas, kehadirannya akan menjadi penanda kehadiran negara. Artinya, kehadiran bahasa Indonesia dalam forum-forum atau peristiwa berbahasa yang sesuai dengan kedudukan dan fungsinya akan menjadi indikator kehadiran negara. Berangkat dari pemahaman di atas, maka bangsa ini mestinya prihatin dan bersedih ketika menyaksikan pemakaian bahasa asing di luar ruang pada hampir seluruh wilayah NKRI yang kurang terkendali. Berbagai jenis spanduk, papan nama yang terpampang di jalan-jalan, permukiman, area pendidikan dari satuan pendidikan terendah sampai satuan pendidikan tertinggi menunjukkan ketidakhadiran negara melalui bahasa negaranya. Hal yang serupa tidak hanya terjadi di kota-kota besar, seperti ibu kota negara, tetapi juga sampai ke ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten/kota, kecamatan, dan desa-desa. Sepertinya, anak bangsa ini sudah tidak risih dengan kondisi tersebut, padahal yang dikomunikasikan itu ditujukan kepada anak-anak bangsa yang sudah memiliki bahasa negaranya sendiri. Bahkan ironisnya, penggunaan bahasa asing itu sering tidak dipahami oleh yang membacanya. Kondisi ini menggambarkan bahwa bangsa ini tengah dilanda krisis identitas. Bangsa ini nyaris gagal dalam membangun kemandiriannya melalui penguatan identitas berupa bahasa negara di negaranya sendiri. Bangsa ini tidak mandiri karena harus menggunakan bahasa lain untuk mengomunikasikan sesuatu kepada sesama anak bangsa, padahal jauh sebelum merdeka para pemuda bangsa ini, tepatnya 28 Oktober 1928, telah menyepakati sebuah bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Kondisi di atas diperparah lagi dengan kurangnya keteladanan dalam penegakan identitas melalui pemakaian bahasa negara atau nasional. Para tokoh panutan yang diharapkan menjadi contoh, belum mampu memainkan peran kepanutannya. Anak-anak bangsa ini hampir-hampir kehilangan tokoh panutannya dalam memantapkan identitas keindonesiaan. Padahal, identitas kebahasaan berupa bahasa Indonesia itu telah mampu merevolusi mental para anak muda pencetus Sumpah Pemuda dari mental



ketergantungan, terjajah, tercerai-berai menjadi anak bangsa yang bermental mandiri, bebas merdeka dalam menentukan nasib bangsa, dan mental keberagaman dalam kesatuan.

Realitas penampakan identitas keindonesiaan dalam wujud bahasa kebangsaan tersebut semuanya merupakan potret dari dunia pendidikan. Maraknya pemakaian bahasa asing yang digambarkan di atas merupakan wujud dari kegagalan dunia pendidikan dalam menanamkan pemahaman akan peran kesejarahan bahasa Indonesia dalam membangun negara bangsa. Kemudian, maraknya pemakaian bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan dan konteksnya menggambarkan dunia pendidikan kita juga gagal memahami kaidah pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar. Bahkan, hasil survei The Organization of Economic Co-operation and Development, melalui program PISA-nya (Programme for International Student Assessment) tahun 2012 dan 2015 menunjukkan bahwa hanya 1,5% siswa Indonesia yang mampu memecahkan soal-soal yang memerlukan pemikiran—itu pun hanya sampai level keempat, belum sampai level keenam—sedangkan sisanya 98,5% hanya mampu memecahkan soal yang bersifat hafalan. Lemahnya kemampuan berpikir anak-anak Indonesia itu pun menunjukkan kegagalan dunia pendidikan dalam membelajarkan bahasa Indonesia. Bukankah bahasa, di samping sebagai sarana berpikir, juga berperan sebagai pembentuk pikiran manusia. Artinya, pembelajaran bahasa Indonesia gagal membentuk pikiran manusia Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas, diperlukan kebijakan penguatan peran bahasa Indonesia di dalam negara dalam rangka membangun kemandirian bangsa. Sementara itu, keberhasilan penguatan peran bahasa Indonesia di dalam negara menjadi indikator kehadiran negara di dalam negaranya sendiri. Oleh karena itu, penguatan bahasa Indonesia di dalam negara dan perannya dalam dunia pendidikan sangat penting. Kebijakan penguatan peran bahasa Indonesia untuk membangun kemandirian bangsa dalam bidang kebahasaan perlu ancangan pembaruan seperti berikut.

## **I. Penguatan Bahasa Indonesia Melalui Jalur Pendidikan Formal**

Persoalan kebahasaan bahasa Indonesia di dalam negara merupakan potret dari dunia pendidikan, seperti digambarkan di atas, menjadi pertimbangan dalam memprioritaskan pembenahan pembelajaran bahasa Indonesia. Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa penguatan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan lebih terencana, terarah, dan terukur. Pembenahan dimaksud haruslah menyangkut keempat standar yang tercakup dalam kurikulum, yaitu standar kompetensi lulusan, isi, proses, dan penilaian. Terkait dengan standar kompetensi, maka kompetensi lulusan yang harus diletakkan sebagai capaian pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya ditujukan agar siswa harus memiliki kompetensi sikap positif terhadap keberadaan bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaannya dan mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar untuk merefleksikan kemampuan berpikir sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis. Dengan capaian kompetensi sikap positif, maka diharapkan anak bangsa ini akan selalu mengutamakan pemakaian bahasa Indonesia sesuai konteks dan situasi yang dipersyaratkan. Adapun pencapaian kompetensi kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai refleksi kemampuan berpikir sistematis, terkontrol, empirik, dan





kritis yang ditandai oleh penggunaan bahasa Indonesia pada segala ranah, termasuk ranah pemakaian bahasa di luar ruang, terhindar dari ketidaktertiban. Ketidaktertiban dari kaidah ejaan, gramatika keahsaannya dan ketidaktertiban dari kaidah logika berpikirnya.

Untuk mencapai kompetensi lulusan di atas, diperlukan materi sebagai isi pembelajarannya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar isi sesuai standar kompetensi yang hendak dicapai. Secara garis besar, untuk pemenuhan kompetensi sikap positif, diperlukan materi-materi bahasa Indonesia yang berhubungan dengan peran kesejarahan bahasa Indonesia dalam membentuk keindonesiaan. Materi-materi itu tentu haruslah diperoleh melalui penelitian yang mampu menghimpun data-data/bukti kesejarahan bahasa Indonesia dalam tiga fase historis terbentuknya nasionalisme, bangsa, dan negara Indonesia, seperti dikemukakan Anwar (2008) berikut ini:

- a. Fase pembentukan konsep kebangsaan
- b. Fase pergerakan kemerdekaan
- c. Fase penanaman identitas

Hal-hal yang termuat dalam materi sejarah bahasa Indonesia (BI) pada fase pembentukan konsep kebangsaan di antaranya berkaitan dengan

- a. uraian genetika-historis bahasa Indonesia BI yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi historisnya, yang spirit/roh awalnya mulai terbentuk dengan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Kedatangan bangsa Eropa dimulai dari Portugis pada pertengahan abad XVI, dilanjutkan Belanda pada akhir abad ke-XVI,
- b. uraian yang memberi penekanan bahwa imperialisme dapat berlangsung di Nusantara dalam waktu yang lama (3,5 abad) di satu sisi karena perbedaan bahasa, ras, dan agama. Untuk itu perlu ada satu bahasa yang melintasi perbedaan bahasa tersebut,
- c. uraian yang berisi pengalaman terjajah bersama mampu diekspresikan dengan baik sehingga muncul sikap kesamaan, senasib, dan sepenanggungan dengan satu medium utama, yaitu BI,
- d. uraian yang memperlihatkan BI menjadi bahasa kebangsaan yang membentuk daya tahan nasionalisme keindonesiaan yang tangguh. Tekanan pada uraian ini dapat dilakukan dengan membandingkan peran BI dengan bahasa Romawi yang punya sejarah besar sebagai sebuah bangsa, tetapi mengalami kegagalan bahasa,
- e. uraian yang memuat puncak capaian BI sebagai bahasa nasionalisme yang tergambar pada ekspresi awal munculnya gagasan kemerdekaan, seperti munculnya organisasi kepemudaan, propaganda melalui media, orasi tokoh pergerakan telah menjadikan BI sebagai senjata utama dalam membangun kesadaran kebangsaan dan spirit perjuangan,
- f. uraian yang memuat pernyataan bahwa Sumpah Pemuda (1928) telah menggunakan isu sentral yang sangat tepat, yaitu (1) ketanahairan, (2) kebangsaan, dan (3) keahasaan. Hal ini harus diberi tekanan dengan menganalogikan jika pilihan Sumpah Pemuda itu didasarkan pada komposisi ras dan agama, pilihan itu sangat rentan bagi ketahanan nasional, serta
- g. uraian yang memuat bahwa pada fase ini, BI telah menunjukkan gejala kuat sebagai spirit bangsa dalam pergerakan kemerdekaan yang ditandai tiga hal, yaitu (1) berkembangnya pendidikan berbahasa Indonesia, (2) berkembangnya



media surat kabar berbahasa Indonesia, dan (3) munculnya sastra fenomenal berbahasa Indonesia.

Hal-hal yang termuat dalam materi sejarah BI pada fase pergerakan kemerdekaan, di antaranya berkaitan dengan

- a. uraian yang memuat tentang tercetusnya Sumpah Pemuda 1928 merupakan awal dari fase BI menjadi alat utama dalam memaknai realitas dunia baru bagi nusantara;
- b. uraian yang berisi tanggung jawab BI dalam mentransmisi terbentuknya harapan masyarakat nusantara untuk merdeka, seperti upaya memperkaya daya ungkap BI dengan menyerap kosakata bahasa nusantara atau bahasa asing serta kemampuan kata dan komposisi kalimat yang mampu menangkap sentimen kebangsaan yang kuat dan meyakinkan rakyat untuk bereaksi. Hal ini memerlukan kajian kosakata dan bangun komposisi kalimat bahasa-bahasa yang digunakan para pejuang kemerdekaan;
- c. uraian yang memuat kemampuan BI menjadi identitas induk yang tumbuh dalam konteks sosial dan berfungsi dalam interaksi politik untuk menciptakan sebuah realitas dinamik dari (1) komunitas yang terberai dalam satu kesatuan kebangsaan, (2) komunitas terjajah yang mampu menyuarakan kemerdekaan, dan (3) komunitas tanpa identitas bersama menjadi komunitas dengan identitas pemersatu yang menjadi dasar berkembangnya interaksi serta relasi nasional; dan
- d. uraian yang bertumpu pada pembuktian BI memenuhi pandangan Kroskirty dalam Anwar (2008) yang menyatakan bahwa penggunaan BI pada fase itu dapat dimaknai sebagai
  1. kesengajaan untuk melakukan pembentukan nasionalisme bangsa Indonesia,
  2. strategi manipulasi lemahnya struktur kesatuan nusantara, dan
  3. kesadaran nyata dalam membentuk identitas bersama secara nasional; yang berbeda dengan negara yang membangun karakter nasionalismenya dengan fokus pada kebebasan individu untuk manipulasi sistem sosial secara fleksibel, yang termanipulasi dalam ras dan kasta.

Adapun hal-hal yang termuat dalam materi sejarah BI pada fase penanaman identitas, seperti dipaparkan Anwar (2008), di antaranya berkaitan dengan

- a. uraian tentang kemampuan BI dalam menjamin diversitas sosial, seperti kenyataan memasuki era kemerdekaan masyarakat Indonesia terstruktur dalam struktur yang sangat kompleks. Namun BI mampu menunjukkan peran yang signifikan sebagai identitas nasional.
- b. uraian pembuktian perkembangan jumlah pemakai bahasa Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, misalnya dapat mengutip temuan Ricklefs (2005) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk yang mampu membaca dalam BI meningkat tajam, seperti ditunjukkan pada data berikut ini:
  1. tahun 1950 jumlah yang mampu membaca dalam BI: 500.000 orang,
  2. tahun 1956 menjadi 933.000 orang,
  3. awal tahun 1970-an menjadi 40,8% dari jumlah penduduk Indonesia saat itu,
  4. berdasarkan Sensus Penduduk 1980, jumlah penduduk yang mampu membaca dalam BI meningkat menjadi 61%, dan berdasarkan Sensus



Penduduk 1990 jumlah penduduk yang mampu membaca dalam BI menjadi 80%.

- c. Uraian yang memuat bahwa masalah bahasa adalah masalah yang menyangkut identitas utama dari sebuah bangsa, misalnya bagaimana bangsa Israel demi sebuah identitas negara, mereka menghidupkan kembali bahasa Ibrani yang telah punah untuk dijadikan bahasa negara mereka, kasus Latvia yang menggalakkan pemakaian bahasa Lativi setelah negara itu berpisah dari Uni Soviet 1991, atau bagaimana bangsa Jepang membangun identitas nasionalnya setelah hancur dalam perang dunia kedua dengan menumbuhkan cinta tanah air melalui penerjemahan semua buku ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Jepang, dan lain-lain.
- d. Uraian yang memuat koneksitas antara BI dan kondisi sosial masyarakat Indonesia, yang ditandai oleh kemampuan BI menjadi
  1. bahasa terbaik untuk komunikasi antaretnik, ras, agama;
  2. bahasa terbaik menggambarkan realitas keindonesiaan;
  3. bahasa yang dapat menjadi refleksi sosial dan bangsa;
  4. bahasa yang dapat mencerminkan realitas demokrasi di Indonesia;
  5. bahasa yang mampu menjadi salah satu kreator tumbuhnya nasionalisme, yang karenanya fondasi-fondasi kenegaraan dicetuskan seperti: Sumpah Pemuda (1928), Proklamasi, UUD1945, dan cetusan ideologi bangsa Pancasila, yang semuanya menggunakan BI.

Luasnya cakupan materi sejarah BI seperti dipaparkan di atas memunculkan persoalan waktu yang tepat dalam penyajian materi tersebut. Materi itu sebaiknya disajikan sejak sekolah dasar di tingkat atas (kelas V atau VI sampai ke tingkat perguruan tinggi). Kedalaman materinya dapat disesuaikan dengan tingkat atau jenjang pendidikannya.

Selanjutnya, berkaitan dengan standar isi yang berhubungan dengan pemenuhan kompetensi penggunaan bahasa Indonesia untuk merefleksikan kemampuan berpikir sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh. Hal itu penting karena hasil studi PISA tahun 2009 dan 2012 menggambarkan bahwa kondisi kemampuan membaca siswa Indonesia tidak jauh berbeda karena Indonesia berada pada posisi terendah setelah Qatar (urutan ke-64 dari 65 negara yang disurvei untuk tahun 2009) dan berada pada urutan di atas Qatar (pada tahun 2012 naik menjadi urutan ke-57) dan persentase kemampuan membaca siswa masih dominan pada peringkat menengah ke bawah, bahkan persentase yang relatif sama dan lebih besar berada pada peringkat/level 1a dan peringkat/level 2, sedangkan yang berada pada peringkat/level menengah ke atas sangat kecil: 1,5% (untuk level 4, tahun 2012) dan 1,0% (untuk level 4, tahun 2009). Hasil studi PISA itu menggambarkan bahwa tidak adanya siswa yang mampu mencapai peringkat 5 dan 6 pada tahun 2012. Sementara itu, peringkat 3 ke bawah (peringkat: 3, 2, 1b, dan 1a) menunjukkan kemampuan menjawab soal-soal yang bersifat hafalan karena jawaban atas pertanyaan sudah tersedia di dalam teks. Dengan mengingat teks yang dibaca sebelum menjawab pertanyaan, siswa akan mampu mencapai skor untuk peringkat tersebut. Adapun peringkat empat ke atas sudah menggambarkan kemampuan menjawab pertanyaan yang memerlukan pemikiran karena untuk menjawab soal-soal itu dituntut kemampuan membuat inferensi terhadap hal-hal yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam teks. Dengan kata lain, 98,5% dan 99% untuk



masing-masing tahun 2012 dan 2009, siswa Indonesia hanya mampu menjawab soal yang bersifat hafalan. Persentase siswa Indonesia yang mampu menjawab soal yang memerlukan pemikiran sangat kecil. Persoalannya, mengapa anak-anak Indonesia tidak mampu mengembangkan pemikirannya, padahal pembelajaran bahasa (Indonesia) sudah diajarkan sejak sekolah dasar? Bukankah bahasa selain sebagai sarana berpikir, juga berfungsi sebagai sarana pembentuk pikiran penuturnya. Dengan demikian, ada persoalan dalam pembelajaran bahasa Indonesia selama ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa menghadirkan negara dalam negara sendiri melalui penguatan identitas berupa bahasa negara perlu diletakkan pada penguatan dunia pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Indonesia sebagai basis utamanya. Penguatan tersebut dilakukan dengan mengembangkan materi, metode pembelajaran, serta sistem penilaian capaian hasil pembelajaran yang relevan dan fleksibel. Suatu pengembangan isi, metode, dan sistem penilaian yang tidak terikat pada jenis kurikulum tertentu melalui inovasi pembelajaran. Dalam konteks itu, perlu dikembangkan pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis pada pengembangan struktur berpikir karena fungsi hakiki bahasa adalah sarana berpikir dan sarana pembentuk pikiran manusia.

### **Penguatan Bahasa melalui Jalur Pendidikan Nonformal/Masyarakat**

Pembinaan bahasa yang dilakukan Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dikategorikan sebagai bentuk pendidikan masyarakat karena sasarannya adalah masyarakat tutur bahasa Indonesia. Sehubungan dengan itu, menarik untuk dicermati kondisi pemakaian bahasa di luar ruang di wilayah Indonesia yang hampir-hampir tidak memperlihatkan kehadiran negara di ruang publik. Bertahun-tahun telah dilakukan penyadaran masyarakat melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik dan bahkan dalam bentuk tatap muka langsung berupa kegiatan penyuluhan bahasa dengan berbagai kelompok sasaran. Apabila kondisi pemakaian bahasa di luar ruang itu, dapat dijadikan indikator capaian pendidikan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pembinaan bahasa melalui jalur tersebut belum membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Dari hari ke hari ruang publik kita banyak diwarnai pemakaian bahasa Indonesia yang kurang tertib, bahkan lebih dari itu masih banyak dijumpai pemakaian bahasa asing yang kurang pada tempatnya. Lalu di manakah letak kegiatan pembinaan bahasa selama ini.

Pembinaan bahasa Indonesia sebagai salah satu bentuk pendidikan masyarakat, dilaksanakan tidak berbasis pada hasil kajian. Segmen sosial yang disentuh tidak didasarkan atas hasil analisis situasi. Memang terdapat kajian yang berupa survei pemakaian bahasa di luar ruang, tetapi analisisnya lebih terfokus pada analisis dari aspek substansi kebahasaannya. Bentuk-bentuk kesalahan penggunaan bahasa itulah yang menjadi sasaran sehingga produk akhir dari kegiatan itu berupa senarai padanan kata/istilah bahasa Indonesianya dari kata/istilah asing yang dijumpai dalam pemakaian bahasa di luar ruang. Ada kegiatan penyuluhan bahasa sebagai bentuk tindakan lanjutan dari hasil pemantauan pemakaian bahasa, tetapi sasarannya bukanlah orang atau pihak yang memproduksi bahasa-bahasa di luar ruang tersebut. Hal ini disebabkan hasil survei tidak mengidentifikasi segmen sosial yang memproduksi bahasa di luar ruang. Yang diidentifikasi adalah aspek kebahasaannya.



Analisis aspek kebahasaan memang sangat penting untuk penyiapan bahan pembinaan, tetapi yang tidak kalah penting ialah ke pihak manakah materi itu akan disampaikan. Antara realitas kebahasaan dengan pencipta realitas tersebut bagaikan dua sisi dari mata uang. Keduanya penting dalam rangka pelaksanaan pendidikan kebahasaan melalui jalur pendidikan nonformal atau pendidikan masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah pendekatan pelaksanaan pembinaan atau pendidikan masyarakat tersebut. Jika pendekatannya hanya mengandalkan model tatap muka, dialog, yang berlangsung secara eksidental, tidak terencana, terarah, dan terukur maka kegiatan pendidikan/pembinaan itu bagaikan menggarami lautan. Untuk itu diperlukan inovasi pendekatan pelaksanaan pembinaan bahasa Indonesia yang lebih terencana, terarah, dan terukur dan lebih ke arah membangun partisipasi khalayak sasaran. Perlu penyadaran atas pentingnya bahasa Indonesia dalam membangun keindonesiaan. Materi-materi yang nonsubstantif tetapi menyadarkan khalayak sasaran akan pentingnya peran bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu disajikan. Pendeknya, materi-materi tentang peran kesejarahan bahasa Indonesia dalam membangun bangsa seperti yang disajikan untuk materi pada pendidikan formal haruslah disajikan sebagai materi pendamping materi substansi kebahasaan. Selain itu, materi tentang potensi disintegrasi bangsa dari aspek kebahasaan patut pula disajikan, seperti materi segmentasi kewilayahan Indonesia berdasarkan politik kebahasaan. Materi yang bersifat membangun kemauan yang kuat untuk bersikap positif terhadap bahasa negara ini penting untuk mengajak masyarakat mengawasi dan meluruskan pemakaian bahasa di sekitar mereka. Mereka mengidentifikasi persoalan kebahasaan yang ada di sekitar mereka dan mereka pula yang mencari pemecahannya. Model pendidikan masyarakat yang bersifat partisipatori memberi keleluasaan pada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan berbahasa Indonesia mereka dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, membangun potensi kesadaran bernegara melalui kesadaran berbahasa negara secara tertib pada setiap warga masyarakat Indonesia merupakan model pendidikan masyarakat yang dipandang efektif. Untuk itu diperlukan data dan pengelolaan data ihwal pihak yang terlibat dalam memproduksi bahasa di luar ruang di samping data kebahasaannya sendiri.

### **Penguatan Bahasa Indonesia di Luar Negara**

Sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat, keberadaan Indonesia tidak cukup hanya kuat di dalam negaranya sendiri, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari negara lain. Salah satu bentuk pengakuan itu adalah diterimanya keberadaan bahasa sebagai identitas dan jati diri bangsa. Wujud pengakuan tersebut adalah dibelajarkannya bahasa Indonesia di negara itu. Artinya, semakin banyak negara yang belajar bahasa Indonesia, semakin banyak pula negara yang mengakui keberadaan Indonesia. Dengan kata lain, pembelajaran bahasa Indonesia di luar negara menjadi sarana diplomasi bagi bangsa Indonesia dalam rangka membangun kemandirian bangsa di mata dunia.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan terhadap negara-negara yang membelajarkan bahasa Indonesia untuk warganya, melalui surat-menyurat dengan KBRI/KJRI pada tahun 2012–2013, diperoleh informasi bahwa terdapat 174 pusat pembelajaran bahasa Indonesia, yang tersebar di 45 negara. Tempat-tempat pembelajaran itu berupa universitas, KBRI/KJRI, dan lembaga kursus. Negara-



negara yang menjadi tempat pembelajaran bahasa Indonesia menyebar di benua Asia, Australia, Amerika, Eropa, dan Afrika dengan kondisi bervariasi.

Selain dukungan banyaknya negara penyelenggara BIPA di luar negara, terdapat juga daya dukung lain yang dapat mempercepat keberterimaan bahasa Indonesia di luar negara, yaitu (a) tersedianya perangkat hukum yang menjadi payung penyebaran bahasa Indonesia di luar negara (UU Nomor 24 Tahun 2009); (b) tersedianya substansi dasar pengembangan bahan pembelajaran yang berupa sistem bahasa Indonesia standar yang mencakup ejaan, tata bahasa, kamus yang sudah mencapai 90.000 lema ditambah 350.000 kata dan istilah untuk 41 bidang ilmu, serta alat uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI); (c) sistem bahasa Indonesia yang relatif sederhana, tidak mengenal kala seperti bahasa-bahasa Indo-Eropa; (d) muncul organisasi profesi yang bergerak pada tataran nonnegara yang menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia di luar negara, seperti: ASILE dan Westralian Indonesian Language Teacher Association (WILTA di Australia), ACICIS (konsorsium pengajar BIPA di Australia), Consortium of the Teaching of Indonesia (COTI di Amerika), Himpunan Penguji Bahasa Indonesia (HIPUBI di Jepang); (e) program beasiswa bagi orang asing dari berbagai negara (Darmasiswa); serta (f) di dalam negara juga terdapat tidak kurang 93 lembaga penyelenggara BIPA yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, berupa perguruan tinggi, lembaga kursus, dan organisasi profesi (APBIPA). Namun demikian, bukan berarti tanpa tantangan.

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya penyebarluasan bahasa Indonesia, yaitu (a) sikap sebagian masyarakat Indonesia yang belum positif terhadap bahasa Indonesia; (b) didukung oleh sikap pemerintah belum menjadikan bahasa Indonesia sebagai prioritas dalam rangka pengembangan diplomasi halus (*soft diplomacy*); (c) kurangnya koordinasi antarpihak terkait dalam negeri mengenai internasionalisasi bahasa Indonesia sehingga keberadaan institusi resmi negara yang menangani masalah kebahasaan (Badan Bahasa) bukan merupakan satu-satunya pintu utama pengelolaan masalah kebahasaan; (d) kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pendukungnya belum memadai; (e) pemberian beasiswa bagi warga negara asing serta persyaratan tenaga kerja asing belum menjadikan kemampuan berbahasa Indonesia sebagai salah satu persyaratan; serta (f) kuatnya kesan bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu varian/dialek bahasa Melayu (sama dengan bahasa Melayu di Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura) karena peran pakar asing yang lebih memilih topik kajiannya bahasa Melayu, menyebabkan muruah bahasa Indonesia tersubordinasi di bawah bahasa Melayu. Kesan ini diperkuat dengan masih adanya sebagian masyarakat Indonesia, termasuk para pemimpin bangsa yang menerima pandangan itu karena keterbatasan pemahaman. Masih berjalannya kerja sama kebahasaan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam (Mabbim), juga turut memperkuat kesan tersebut.

Dalam rangka mempertegas identitas keindonesiaan, yang salah satunya berupa bahasa nasional, bangsa Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang tergabung dalam masyarakat Ekonomi Eropa (Uni Eropa), yang setiap negara menyatakan secara tegas tentang identitas mereka. Bahasa nasional negara-negara yang tergabung dalam masyarakat Uni Eropa diakui sebagai bahasa resmi. Artinya, setiap negara mempertegas kemandirian mereka sebagai sebuah negara bangsa. Dalam hubungan dengan itu, piagam kerja sama Asean yang sudah ditandatangani



2007 yang di dalamnya memuat bahasa kerja sama Asean adalah bahasa Inggris belum terlambat untuk ditinjau kembali. Sangat menarik untuk direnungkan, bagaimana Austria yang perbedaan bahasanya dengan bahasa Jerman hanya terjadi pada 23 kosakata yang menyangkut bidang makanan meminta agar diakui sebagai varian yang berbeda dengan bahasa Jerman sebagai persyaratan untuk masuk menjadi anggota Uni Eropa. Tuntutan Austria itu dimuat dalam piagam Uni Eropa, protokol Nomor: 10. Di samping itu, pemerintah juga perlu meninjau kembali kerja sama kebahasaan dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam karena semakin kurang efektif.

Seiring dengan itu, pembenahan hal-hal yang bersifat substantif kebahasaan sebagai komponen utama dan penting bagi upaya memperlancar proses penyebarluasan bahasa negara, seperti materi pembelajaran BIPA yang sesuai kebutuhan dan peringkat pembelajar, media pembelajaran, alat evaluasi hasil pembelajar, serta kualitas tenaga pembelajar harus ditangani secara sungguh-sungguh. Untuk itu, diperlukan data dan pengolahannya berupa tingkat variasi kemampuan berbahasa penutur asing secara umum untuk mengembangkan bahan BIPA berjenjang.

Selain itu, berbagai program kemitraan antarpemangku kepentingan BIPA juga perlu dilakukan untuk memfasilitasi lembaga BIPA di luar negeri, antara lain melalui penyediaan dan pelatihan tenaga pengajar serta penyediaan perangkat pembelajaran, seperti kurikulum, silabus, dan bahan ajar. Hal lain yang tidak kalah penting adalah payung hukum yang menyangkut kebijakan-kebijakan, seperti peraturan perundang-undangan, pedoman, dan prosedur operasional standar sebagai landasan dan acuan pengembangan program BIPA. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlu difasilitasi terbentuknya lembaga yang menjadi wadah segala bentuk kegiatan yang menunjang upaya penyebarluasan bahasa negara melalui pembelajaran BIPA di berbagai negara, baik yang dikelola oleh pemerintah Indonesia melalui KBRI/KJRI maupun lembaga swasta negara setempat. Lembaga yang diusulkan tersebut secara konkret berbentuk institut bahasa Indonesia.

Program penyebarluasan bahasa negara perlu memaksimalkan peran (a) KBRI/KJRI/Atdikbud, (b) Perguruan tinggi di LN, (c) WNI yang menjadi *permanent resident* di LN, (d) Pemerhati studi Indonesia di LN, (e) WNI yang belajar, bertugas, dan bekerja di LN, (f) WNA peneliti tentang Indonesia (g) WNA yang belajar, bekerja, dan berwisata di Indonesia, (h) Perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, (i) Media cetak dan elektronik asing yang berhaluan Indonesia, (j) Negara yang berpotensi menjadi investor di Indonesia, dan (k) Perwakilan Negara Asing (kedubes/konsulat) yang ada di Indonesia, serta (l) WNA yang menikah dengan orang Indonesia dan menjadi WNI sebagai agen penyebarluasan bahasa negara.

Kemudian, untuk mengatasi kesan bahasa Indonesia tersubordinasi bahasa Melayu, perlu digalakkan kajian Indonesia dengan melibatkan para indonesianis sehingga resonansi tentang bahasa Indonesia mampu menembus wacana akademik dunia. Selain itu, hal yang juga perlu dilakukan adalah pembuktian tentang asal orang-orang Austronesia dari wilayah Indonesia, bukan dari Indocina atau Melanesia perlu digalakkan karena seiring dengan itu hipotesis tentang lokasi atlantis, sebuah benua yang menjadi pusat peradaban dunia dalam legenda Plato, akan saling mendukung dengan bukti peradaban Austronesia awal.



## **PEMANFAATAN DATA KEBAHASAAN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI PENGUATAN PERAN BAHASA LOKAL/DAERAH**

Berdasarkan pemetaan bahasa yang telah dilakukan hingga 2014 diperoleh gambaran bahwa di Indonesia terdapat 659 bahasa lokal/daerah. Keberadaan bahasa-bahasa tersebut sebagian besar terancam kepunahan. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan bahasa-bahasa daerah itu terancam punah, yaitu:

- a. Sebagian besar bahasa itu memiliki penutur di bawah seribu jiwa. Bahasa-bahasa dalam kondisi tersebut banyak ditemukan di kawasan timur Indonesia, seperti di NTT, Maluku, Maluku Utara, Halmahera, Papua, dan Papua barat.
- b. Globalisasi mendorong kelas menengah, baik di perkotaan maupun di pedesaan merasa bergengsi menggunakan bahasa asing sehingga cenderung meninggalkan bahasa ibu mereka, yang berupa bahasa lokal/daerah.
- c. Proses nasionalisasi bahasa negara, bahasa Indonesia, cenderung meminggirkan keberadaan bahasa-bahasa lokal/daerah.
- d. Pengembangan bahasa daerah, khususnya pengembangan daya ungkap (kamus), pengembangan tata bahasa, dan ejaan, masih belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah seiring era otonomi daerah. Hal itu juga didorong kurangnya kemauan pemerintah daerah setempat untuk mendukung bahasa daerah sebagai materi muatan lokal pada pendidikan formal.

Kondisi bahasa lokal/daerah yang sebagian besar mengkhawatirkan itu perlu mendapat perhatian karena keberadaannya sangat bermanfaat

- a. sebagai bukti untuk memahami kandungan makna semboyan negara bangsa, *Bhinneka Tunggal Ika*. Hal ini karena secara historis, bahasa-bahasa serumpun memelihara unsur-unsur kebahasaan yang memperlihatkan pertalian bahasa-bahasa tersebut satu dengan yang lainnya;
- b. sebagai pembentuk pikiran penuturnya. Bahasa-bahasa daerah yang menjadi bahasa pertama anak bangsa Indonesia dapat menyediakan bukti penjejak cara pandang suku-suku bangsa pemiliknya. Pemahaman akan cara pandang suku-suku bangsa itu tidak hanya menjelaskan cara pandang terhadap keberadaan suku bangsa itu secara internal, tetapi juga memuat gambaran cara pandang suku bangsa itu terhadap suku bangsa lain yang berkontak dengannya. Bukti-bukti itu dapat ditemukan dalam terminologi yang menyangkut, misalnya stereotip, ungkapan-ungkapan, dan lainnya. Pemahaman terhadap cara pandang suku bangsa dengan sendirinya dapat menjadi pintu masuk memahami perilakunya. Sementara itu, pemahaman terhadap cara pandang yang memengaruhi perilaku dapat menjadi titik masuk bagi pemahaman antarsuku bangsa dalam rangka membangun komunikasi sosial menuju integrasi sosial serta bangsa; dan
- c. menjadi sumber pendukung dan pemer kaya bahasa nasional/negara, terutama menyangkut pemer kaya daya ungkap yang mencerminkan kondisi sosial budaya dan ilmu pengetahuan tradisional. Semakin terbukanya ruang bagi kontribusi bahasa daerah itu pada upaya mendukung dan memper kaya daya ungkap bahasa negara, maka semakin memunculkan kepercayaan penuturnya terhadap keberadaannya dalam NKRI. Kondisi ini dapat dijadikan modal sosial dalam membangun kebersamaan bangsa.
- d. bahasa daerah yang kaya akan daya ungkap dan mengandung dimensi afektif, emosional, sistem tingkat tutur, serta sistem honorifik (bentuk hormat) dapat





menjadi sarana penumbuhan budi pekerti anak bangsa. Dalam konteks ini, cerita-cerita lokal, dongeng-dongeng lokal, dan legenda berbagai kearifan tokoh yang digambarkannya dapat menjadi sumber literasi sekolah yang menginspirasi siswa untuk berperilaku arif dan santun.

Kekayaan berupa modal sosial bangsa yang terpendam dalam potensi bahasa dan sastra daerah/lokal haruslah dilindungi, dibina, dan dikembangkan. Perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah mestinya diletakkan dalam satu kerangka kebijakan politik bahasa nasional yang holistik. Kerangka kebijakan tersebut dapat memberikan arah bagi perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah dalam empat kerangka strategis, yang meliputi

- a. perlindungan, pembinaan, dan pengembangan secara terarah, terencana, dan terukur melalui jalur pendidikan;
- b. perlindungan, pembinaan, dan pengembangan secara terarah, terencana, dan terukur melalui jalur penguatan partisipasi masyarakat atau bersifat partisipatoris;
- c. perlindungan, pembinaan, dan pengembangan secara terarah, terencana, dan terukur melalui jalur konservasi/dokumentasi; dan
- b. perlindungan, pembinaan, dan pengembangan secara terarah, terencana, dan terukur melalui kajian kekerabatan antarbahasa untuk menemukan keterhubungan satu dengan yang lainnya.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kerangka kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah secara terarah, terencana, dan terukur melalui jalur pendidikan. Hal-hal tersebut adalah (a) pengidentifikasian bahasa-bahasa daerah yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan formal, terutama terkait persyaratan keberadaan peserta didik; (b) pengembangan tenaga pendidik; dan (c) pengembangan substansi bahan pembelajaran.

Pengidentifikasian peserta didik merupakan hal yang sangat penting karena kondisi jumlah penutur bahasa daerah yang sangat bervariasi, ada yang jumlah penuturnya banyak dan ada pula yang jumlah penuturnya kecil. Bagi bahasa yang jumlah penuturnya kecil, seperti kondisi sebagian besar bahasa-bahasa daerah di kawasan timur Indonesia, tentu kurang tepat untuk dikembangkan sebagai materi pembelajaran melalui jalur pendidikan formal. Bahasa-bahasa daerah semacam ini hanya dapat dilindungi, dibina, dan dikembangkan melalui jalur kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah yang bersifat partisipatoris dan/atau jalur kebijakan konservasi/dokumentasi. Bagi bahasa-bahasa daerah yang penuturnya kecil dan tidak terkonsentrasi dalam satu wilayah geografis dapat digolongkan sebagai bahasa yang sangat kritis dan hanya dapat dilindungi melalui jalur kebijakan konservasi/dokumentasi, seperti bahasa Tandia yang penuturnya hanya tersisa tiga orang (2012) dan hidup terpisah dalam geografi yang berbeda.

Hal yang berkaitan dengan penyediaan tenaga kependidikan perlu dipertimbangkan keberadaan institusi kependidikan yang menghasilkan pendidik bahasa daerah serta kebijakan pengangkatan dan sertifikasi pendidik bahasa daerah. Perguruan tinggi yang membuka jurusan bahasa daerah sangat langka sehingga mengakibatkan langkanya pengajar bahasa daerah. Hal itu terjadi karena pemerintah daerah kurang memberi perhatian bagi upaya perlindungan, pembinaan,



dan pengembangan bahasa daerah yang terdapat di wilayahnya melalui jalur pendidikan formal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penanganan masalah ketersediaan pendidik bahasa daerah dengan memanfaatkan sarjana bahasa Indonesia melalui pendidikan tambahan untuk keahlian dalam pembelajaran bahasa daerah. Kebijakan ini dapat dilakukan jika pembukaan jurusan bahasa daerah pada perguruan tinggi yang ada kurang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Kemudian, berkaitan dengan pengembangan substansi bahan pembelajaran hendaknya dilakukan tahapan-tahapan penyediaan, seperti (a) pengembangan kurikulum dan (b) pengembangan materi yang dapat dilakukan melalui kajian variasi dialektal, kajian aspek kebahasaan bahasa daerah yang mencakup aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, serta teks/oragmatik. Kajian dari aspek variasi dialektal bertujuan untuk menetapkan varian dari bahasa daerah yang akan disepakati sebagai bahasa standar. Adapun kajian dari aspek fonologi bertujuan untuk mengembangkan sistem ejaan standar/baku yang akan digunakan dalam sistem tata tulis; kajian aspek morfologi, sintaksis, dan semantik, serta teks/pragmatik bertujuan untuk mengembangkan tata bahasa standar/baku bahasa daerah tersebut. Kajian lain yang tidak kalah penting adalah kajian sistem leksikal untuk mengembangkan kamus standar bahasa daerah tersebut.

Selain itu, patut ditambahkan bahwa dalam rangka pengembangan materi pembelajaran hendaknya memanfaatkan potensi bahasa sebagai sarana pengembangan kemampuan logika, etika, dan estetika siswa. Ketiga kebutuhan pengembangan diri manusia memang dapat disediakan bahasa. Melalui kemampuan berbahasa secara benar, sesuai struktur logika bahasanya akan membentuk struktur berpikir logis verbal kepada siswa. Kalimat-kalimat yang urutannya mengikuti kaidah struktur yang benar, kemudian teks-teks yang dibangun mengikuti struktur teks yang benar juga akan melatih berpikir sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis kepada siswa.

Adapun pemenuhan kebutuhan pengembangan etika dapat dilakukan dengan menyeleksi bahan pembelajaran berupa kosakata dan kalimat yang mencerminkan varian yang sesuai dengan konteks situasi pemakaiannya. Sebagai contoh, oposisi kosakata halus dan biasa serta bentuk hormat perlu diperkenalkan konteks situasi pemakaiannya sehingga peserta didik mampu melakukan diksi kebahasaan yang disesuaikan dengan konteks pemakaiannya. Siswa dapat menentukan bentuk tuturan tertentu ketika berbicara dengan mitra wicara yang seusia ataupun dengan mitra wicara lebih tua yang memiliki posisi sosial lebih tinggi dari dirinya.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kemampuan estetika, materi-materi kebahasaan yang berupa ekspresi sastra, sejenis pantun, cerita-cerita yang mengandung diksi yang kaya akan nilai-nilai estetis dan moral dapat menjadi bahan pembelajaran. Materi yang termasuk ke dalam pengembangan kemampuan estetika ini adalah “menulis indah”, yang dahulu pada tahun-tahun 1970-an ke bawah menjadi materi utama di jenjang pendidikan dasar. Materi ini perlu dihidupkan kembali, mengingat majunya teknologi komunikasi (komputer, ponsel, dan lain-lain) yang dapat menggeser kemampuan menulis dengan tangan. Saat ini sudah cukup langka tulisan tangan serapi tulisan tangan orang-orang tua generasi 1945–1970-an.

Selain itu, materi pembelajaran muatan lokal bahasa daerah hendaknya juga menjadi penghela bagi pembelajaran sebagai kearifan lokal, seperti sejarah, budaya, seni, dan keterampilan lokal. Materi-materi yang berupa kearifan lokal



tersebut dapat dikomunikasikan sebagai substansi isi teks materi pembelajarannya dengan pembelajaran berbasis teks dengan berbagai struktur berpikirnya.

Selanjutnya, kebijakan politik kebahasaan yang bersifat partisipatoris berperan sebagai kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa yang penuturnya kecil dan terkonsentrasi pada satu tempat atau beberapa tempat, tetapi dalam jumlah yang lebih besar (100–1.000 jiwa). Selain hal tersebut, penutur bahasa tersebut jarang yang berusia muda, tetapi di atas usia sekolah sehingga tidak dimungkinkan untuk ditempuh kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka implementasi kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa bersifat partisipatoris ini, kegiatannya didasarkan pada upaya menggugah kemauan penutur untuk melindungi, membina, dan mengembangkan bahasanya sendiri. Masyarakat turut memanfaatkan segala potensi sosial budaya untuk menggerakkan kembali fungsi sosial bahasa daerahnya. Dalam hal itu, pemerintah berperan memfasilitasi kegiatan masyarakat tersebut dalam bentuk penyediaan fasilitas, baik yang menyangkut substansi maupun teknis.

Adapun kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa melalui jalur konservasi/dokumentasi berperan sebagai kebijakan penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan daerah yang sudah punah atau kritis. Apa yang dimaksud sudah punah di sini, tentu dengan catatan masih tersedia dokumen tertulis tentang bahasa-bahasa tersebut, misalnya perlindungan terhadap bahasa Jawa Kuno yang masih menyimpan naskah tertulis. Sasarannya adalah mendokumentasikan bahasa itu dari aspek struktur kebahasaannya atau aspek sosial sesuai dengan jangkauan yang dapat dilakukan berdasarkan dokumen yang tersedia. Upaya yang dapat dilakukan dengan bentuk pendokumentasian adalah perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa-bahasa yang dalam posisi kritis, misalnya bahasa yang jumlah penuturnya kecil, tidak terkonsentrasi dalam satu wilayah tutur atau dapat saja terkonsentrasi di beberapa wilayah tutur dengan jumlah penuturnya di bawah sepuluh jiwa.

## **PEMANFAATAN DATA KEBAHASAAN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN**

Keberagaman bahasa merupakan kekayaan bangsa Indonesia sebagai rahmat Tuhan Yang Mahakuasa. Keberagaman potensi tersebut telah memberi wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya kesatuan bangsa sebab selain merupakan rahmat, keberagaman tersebut juga berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Dalam kondisi seperti itu, bahasa Indonesia berperan sebagai sarana pemersatu perbedaan tersebut sehingga dapat tercipta masyarakat yang harmonis, saling bertenggang rasa, dan hidup berdampingan secara damai. Sementara itu, bahasa-bahasa lokal/daerah yang dari segi pengelompokannya merupakan bahasa yang diturunkan dari bahasa Austronesia, dapat menjadi bukti akan kebenaran semboyan Bhinneka Tunggal Ika karena meskipun beragam suku bangsa yang ditandai oleh keberagaman bahasa lokal, sesungguhnya berasal dari satu asal yang sama. Dalam konteks itu, kajian kekerabatan bahasa melalui penelusuran bahasa purba yang menurunkan bahasa-bahasa lokal itu dapat menjadi bahan untuk menyusun strategi pemanfaatan bahasa lokal sebagai sarana diplomasi antarsuku bangsa. Bentuk-bentuk kekerabatan bahasa yang menunjukkan keberagaman, tetapi satu asal dapat

ditemukan, misalnya dalam peta kekerabatan kata-kata yang menjadi refleksi makna, masing-masing: lima dan dua pada peta berikut ini.



**Peta 1 Keberagaman Bentuk Makna ‘Lima’**

Makna ‘lima’ pada peta di atas memperlihatkan bahwa dalam bahasa-bahasa di Indonesia, ternyata kata bermakna ‘lima’ dapat muncul dalam wujud yang bervariasi sesuai dengan kaidah perubahan bunyi yang dialami dalam tiap-tiap bahasa. Ada yang muncul sebagai *lima*, *lime*, *limo*, *dima*, *dimo*, dan *rim*. Semua kata yang menjadi refleksi makna ‘lima’, sekalipun berbeda-beda wujudnya masih dapat dihubungkan pada sebuah asal yang sama, yaitu diturunkan dari bentuk Austronesia Purba \*lima. Artinya, berbeda, tetapi satu asal.



**Peta 2 Keberagaman Bentuk Makna ‘Dua’**

Peta 2 menggambarkan bahwa makna ‘dua’ memiliki berbagai varian dalam berbagai bahasa lokal/daerah, yaitu *loro*, *dua*, *due*, *duo*, *rua*, *roa*, *roah*, *ros*, *ru*, dan *rue*. Semua varian itu dapat dihubungkan pada sebuah kata bahasa Austronesia Purba, yaitu ‘dua’. Perubahan menjadi berbagai varian itu sesuai kaidah perubahan



bunyi yang berlaku dalam tiap-tiap bahasa daerah tersebut. Seperti halnya perubahan kata bermakna ‘urat’ di atas, yang mencolok terjadi adalah perubahan dari bentuk Austronesia Purba \*dua menjadi bahasa Jawa Modern, *loro*. Tahap-tahap perubahannya adalah bunyi Austronesia Purba [d] menjadi bahasa Jawa [r] sehingga muncul bentuk bahasa Jawa Kuno *rua*. Kemudian, urutan vokal Austronesia Purba [ua] menjadi [o] (lihat juga proses perubahan kata Austronesia Purba: \*urat di atas) sehingga muncul bentuk [ro], misalnya pada bentuk bahasa Jawa *rolas* ‘dua belas’, *rongpuluh* ‘dua puluh’. Selanjutnya, penutur bahasa Jawa kurang suka kata bersilabe satu, lalu bentuk [ro] diulang menjadi *roro*. Bentuk ini dapat ditemukan pada penutur bahasa Jawa Salira, Banten. Kemudian dari bentuk *roro* terjadi proses disimilasi, bunyi [r] pada suku kata pertama saling memengaruhi dengan bunyi [r] pada kata *roro* sehingga bunyi [r] pada silabe pertama berubah menjadi [l], lalu muncullah bentuk dalam bahasa Jawa Modern *loro*.

Selain peta kekerabatan bahasa, kajian strategi kesastraan dalam konteks kebijakan bahasa juga dapat dilakukan untuk pembuktian semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini dapat dilakukan karena jika bahasa yang menjadi medium utama kegiatan bersastra dapat ditelusuri relasi kekerabatannya, akan dengan sendirinya ekspresi sastra daerah yang menggunakan bahasa daerah pun mampu dirunut kesatuasalnya meskipun berbeda. Kekerabatannya dapat dilihat dari aspek tema, penokohan, karakter, alur cerita, dan semua aspek intrinsik sastra lainnya. Sebagai contoh, kisah tentang tema “kebodohan membawa malapetaka” muncul dengan nama dan tokoh yang berbeda pada masyarakat Jawa, Bali, dan Sasak. Cerita itu pada masyarakat berpenutur bahasa Jawa dikenal dengan cerita *Joko Bodo*, pada masyarakat berpenutur bahasa Bali dikenal dengan cerita *I Blog*, sedangkan di masyarakat berpenutur bahasa Sasak dikenal dengan nama cerita *Loq Sekeq*. Nama cerita yang berbeda-beda itu diambil dari nama lokal. Dalam masyarakat Jawa, nama Joko adalah nama khas Jawa, seperti Joko Tingkir, Joko Suryo, dan lain-lain. Begitu pula nama awal yang dimulai dengan huruf/bunyi [l] merupakan nama khas daerah Bali, seperti I Made Suastika dan nama Loq Sekeq adalah nama khas daerah Sasak. Loq adalah kata sandang semacam si dan sang dalam bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Sasak disematkan pada nama perempuan. Kata Sekeq dalam bahasa Sasak berarti satu. Artinya, nama itu adalah nama anak perempuan pertama. Satu hal yang menarik adalah terdapat perbedaan nama cerita dan tokoh, tetapi memiliki kesamaan tema. Kesamaan cara pandang dalam melihat fenomena kebodohan sebagai sesuatu yang tidak baik dan sering membawa malapetaka menjadi pandangan masyarakat Indonesia. Hal yang tidak mungkin apabila sebuah cerita memiliki gagasan yang sama jika tidak karena kesatuasalan. Memang terjadi perbedaan nama dalam cerita, tetapi hal tersebut karena disesuaikan dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, kajian pemetaan dan kekerabatan sastra dapat menjadi ancangan kajian dalam rangka kajian strategi dan diplomasi kebahasaan.

Peta-peta kekerabatan bahasa, termasuk sastra di atas dapat menjadi bahan dalam laboratorium kebinekaan bahasa-bahasa di Indonesia. Laboratorium ini akan sangat bermanfaat bagi anak bangsa dalam memverifikasi pemahamannya terhadap konsep Bhinneka Tunggal Ika melalui bukti-bukti kebahasaan, termasuk kesastraan yang sangat beragam di Indonesia. Selain itu, laboratorium juga dapat menjadi media pembelajaran masyarakat Indonesia pada umumnya secara faktual dan empirik bagi kondisi keberagaman bangsa Indonesia. Setiap daerah, melalui unit



pelaksana teknis Badan Bahasa, dapat mengembangkan laboratorium kebinekaan, di samping laboratorium tingkat nasional yang terdapat di pusat. Laboratorium yang terdapat di daerah memuat kondisi keberagaman yang terjadi di wilayah itu sendiri, sedangkan di tingkat pusat, laboratorium memuat semua keberagaman daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Desain laboratorium minimal memiliki dua ruangan utama, satu ruang peragaan dan satu ruang simulasi kebinekaan dalam ketunggalikaan, yang menjadi tempat permainan kebinekaan dalam ketunggalikaan. Ruang peragaan dibagi menjadi dua ruangan. Ruang peragaan yang pertama memuat peta-peta bahasa dan sastra yang menggunakan medium bahasa daerah disertai media visualnya. Visualisasi dapat berupa sarana digital yang ketika tombol peta bahasa tertentu ditekan, akan muncul film singkat tokoh lokal bahasa itu yang bercakap menggunakan bahasa daerah setempat dengan menggunakan pakaian adat. Kemudian, ketika tombol sastra ditekan, akan muncul segala jenis ekspresi sastra yang menggunakan medium bahasa itu, yang jika ditekan pada pilihan jenis sastra tertentu akan muncul film singkat tentang wujud pementasan jenis sastra tersebut. Pada ruangan peragaan kebinekaan itu juga tersedia kamus bahasa lokal dalam bentuk digital, kamus-kamus yang menjelaskan nama-nama lokal pakaian adat yang digunakan, baik oleh tokoh adatnya maupun yang digunakan untuk pementasan jenis sastra tersebut. Ruang kebinekaan benar-benar dibuat untuk menciptakan suasana pemahaman akan keberagaman bangsa dari aspek kebahasaan dan kesastraan yang menggunakan medium bahasa. Dengan demikian, setiap orang yang masuk ke ruangan itu benar-benar dibawa ke alam keberagaman bangsa Indonesia.

Ruang peragaan yang kedua memuat peta yang memberikan pemahaman tentang relasi kekerabatan bahasa dan ekspresi sastra yang menggunakan medium bahasa. Di ruangan itu, dapat ditemukan peta kekerabatan antarbahasa di setiap wilayah berdasarkan wilayah kebahasaan yang memiliki relasi kedekatan, pohon kekerabatan bahasa, serta pohon kekerabatan sastra. Di dalam ruangan itu pula, tersajikan pola penyebaran/migrasi suku-suku bangsa yang terdapat di Indonesia berdasarkan peta bahasa dan peta sastra. Dengan demikian, setiap orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut diharapkan akan terbangun kerangka berpikir bahwa suku-suku bangsa yang beragam itu sesungguhnya memiliki asal yang sama.

Adapun ruangan ketiga, ruang simulasi. Ruang ini merupakan tempat bermain dan menguji ketangkasan seseorang untuk memprediksi bentuk-bentuk bahasa yang berkerabat pada suatu bahasa tertentu, sesuai dengan petunjuk permainan dan pemahaman kaidah perubahan bunyi yang bersifat teratur dalam bahasa-bahasa lokal/daerah. Setiap orang dapat menguji ketangkasannya dengan yang lain. Pemain yang tangkas dalam permainan simulasi itu akan mendapat skor tertinggi. Konsep ini mirip *game*, tetapi bahannya adalah bahasa-bahasa berkerabat. Boleh jadi, perintah dalam simulasi itu tidak hanya menyangkut satuan leksikal yang berkerabat, tetapi juga dapat berupa perintah tentang kaidah yang mengatur perubahan suatu kata dalam satu bahasa daerah ke bahasa daerah lain ataupun tentang tempat yang menjadi lokasi penggunaan bahasa.

Kajian strategis yang tidak kalah penting lainnya adalah kajian tentang hipotesis tanah asal penutur Austronesia yang berasal dari Inonesia, bukan dari Indocina (Blust, 1984; Blundel, 2009; Billwood, 2000) dan dari Kepulauan Melanesia, Kepulauan Bismark (Dyen, 1962 dan 1965; Murdock, 1964; Terrel,



1981). Kajian ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat hipotesis selama ini yang mencanangkan asal peradaban manusia dari Indonesia. Santos (2009), dalam bukunya *Atlantis: The Lost Continent Finally Found*, mengajukan sebuah hipotesis tentang benua dalam legenda Plato itu berada di wilayah Indonesia. Jika hal itu benar adanya, wilayah Indonesia merupakan tempat awal persemaian peradaban manusia di dunia. Pandangan itu, jika beranalogi dengan teori laju perkembangan leksikal yang diajukan Dyen (1965) dan banyaknya situs-situs purba yang ditemukan di wilayah Indonesia, mungkin saja wilayah Indonesia merupakan tempat persemaian peradaban umat manusia, sebagaimana Dyen menyatakan bahwa di wilayah yang memiliki tingkat keberagaman bahasa, wilayah itu dapat dihipotesiskan sebagai pusat persebaran. Oleh karena itu, kajian aspek linguistik tentang asal persebaran penutur Austronesia dapat saling mendukung dengan kajian arkeologi di wilayah Indonesia, termasuk kajian tentang situs Gunung Padang dan Atlantis.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai catatan penutup berikut ini.

- a. Elemen bahasa dipilih sebagai salah satu pengikat nasionalisme keindonesiaan, membutuhkan kepiawaian bangsa Inonesia untuk mengelola dan memanfaatkan data keberagaman bahasa di Indonesia sebagai bahan perumusan dan implementasi kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan.
- b. Kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan dengan tujuan menjadikan bahasa sebagai salah satu penopang bangunan negara Indonesia yang memiliki identitas/jati diri. Kebijakan tersebut dapat diimplementasikan melalui pemanfaatan dan pengolahan data kebahasaan yang berguna untuk (1) membangun kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa nasional/bahasa negara; (2) membangun kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa lokal/bahasa daerah; (3) membangun kemandirian bangsa melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan.
- c. Pembangunan kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa nasional/negara dapat ditempuh melalui (1) jalur pendidikan, baik formal maupun nonformal melalui pembenahan kurikulum pendidikan bahasa Indonesia yang berorientasi pada pembelajaran bahasa dalam rangkan membentuk kemampuan berpikir; dan (2) penguatan bahasa Indonesia di ruang publik dan penyebarluasan pemakaian bahasa di luar negara dalam rangka menghadirkan negara Indonesia di dalam dan di luar negara.
- d. Pembangunan kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa dan sastra lokal/daerah dapat ditempuh melalui perlindungan, pengembangan, serta pembinaan bahasa dan sastra lokal dalam memperkokoh jati diri bangsa yang beragam.
- e. Pembangunan kemandirian bangsa melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan dapat dilakukan melalui pemanfaatan hasil pengolahan data kebahasaan (bahasa dan sastra) dalam rangka penguatan karakter bangsa yang beragam, tetapi satu asal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ahyar. (2008). "Bahasa Indonesia dan Realitas Indonesia". Makalah pada Kongres Bahasa Indonesia ke-IX. Jakarta
- Billwood, Peter. (2000). *Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Blundell, David (Ed.). (2009). *Austronesian Taiwan: Linguistic, History, Ethnology, and Prehistory*. Berkeley: The Regents of the University of Berkeley.
- Blust, R. (1984). "The Austronesian Homeland: A Linguistic Perspective". Pada AP 26: 45-67.
- Duranti, Alessandro. (1007). *Linguistic Anthropology*. Cambridge: The United Kingdom of Cambridge University Press.
- Dyen, Isidore. (1962). "The Lexicostatistical Clasification of the Malayopolynesian". *Language* 38: 38-46.
- Dyen, Isidore. (1965). "A Lexicostatistical Classification of the Austronesian Languages". Pada *International Journal of American Linguistics. Memoir, 19 (Jil. 31, No.1)*.
- Foley, William A. (1998). *Anthrpological Linguistics: an Introduction*. Malden, USA: Blackwell Publishers Inc.
- Hudson, R.A. (1995). *Sosiolinguistik*. Diterjemahkan oleh Rochayah dan Misbach Djamil (1995). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kuan Yew, Lee. (2013). *One Men's View of The World*. Singapore: Straits Times Press.
- Kridalaksana, Harimurti. (2008). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Mahsun. 2015. *Indonesia dalam Perspektif Politik Kebahasaan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Mahsun. 1995. *Dialektologi Diakronis: Sebuah Penantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahsun. 2009. "Linguistik dan Studi tentang Kemanusiaan". Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Linguistik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, 24 Januari 2009.
- Mahsun. 2010. *Genolinguistik: Kolaborasi Linguistik dengan Genetika dalam Pengelompokan Bahasa dan Populasi Penuturnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Murdock, G. 1964. "Genetic Clasification of the Austronesian Languages: A Key to Oceanic Culture". *History* 3: 117-126
- OECD. 2014. What 15-Year-Old-Knows and what They Can Do with What They Know. PISA 2012.
- Santos, Arysio. 2009. *Atlantis: The Lost Continent Finally Found. Seri Terjemahan Indonesia*. Jakarta Selatan: PT Ufuk Publishing House.
- Terrel, J. 1981. "Linguistics and the Peopling of the Fasific Island.". *Journal of the Polynesian Sociaty*, 90: 225-258.





**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Prof. Dr. Mahsun  
Judul Makalah : “Pengelolaan, Pengintegrasian, dan Pemanfaatan Data Bahasa dan Sastra dalam Perumusan dan Implementasi Kebijakan Kebahasaan yang Berkeindonesiaan”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 13.45—15.00  
Moderator : Drs. Muhammad Muis  
Pencatat : 1. Dewi Khairiah  
2. Nadia Almira Sagita

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Kebijakan Kebahasaan Berkeindonesiaan
2. Arah pembangunan bidang kebahasaan yang mampu menopang bangunan negara yang memiliki kemandirian dan diakui negara lainnya.
3. Kemandirian bangsa tampil sebagai negara yang utuh, tidak hanya teritorial, ekonomi, pertahanan, politik, sosial, dan budaya, tetapi juga sebagai negara bangsa yang memiliki identitas. Salah satu identitas bangsa adalah bahasa, yakni bahasa negara dan bahasa daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
5. Keyakinan bahwa bahasa Indonesia identik dengan keindonesiaan kita.
6. Masalah bahasa menjadi penting karena terkait dengan nasionalisme untuk menyatukan warga negara, bisa karena kesamaan ras, agama, dan bahasa.
7. Dua hal yang dihadapi satu bangsa jika mengawasi bangsa lain, yaitu populasi dan bahasa setempat.
8. Elemen yang cocok menyatukan bangsa di Indonesia adalah bahasa, bukan ras dan agama.
9. Contoh kasus: India dan Pakistan memiliki bahasa yang sama, lalu pecah merdeka. India dan Pakistan menyebut bahasa yang sama menjadi nama yang berbeda, yakni Hindi dan Urdu. Bahasa yang sama dibedakan demi identitas, contohnya di Tiongkok yang memiliki 56 bahasa lokal. Demi kebangsaan, semua bahasa tersebut harus tunduk pada satu aksara, yaitu aksara Han.
10. Ketika Israel merdeka, Israel ingin berbeda dengan negara-negara sekitarnya. Israel menghidupkan kembali bahasa Ibrani yang sudah ratusan tahun mati.
11. Tugas dan fungsi Badan Bahasa adalah membuat kebijakan kebahasaan dalam kerangka keindonesiaan, bukan meneliti seperti perguruan tinggi. Lakukan penelitian atau riset, tetapi yang aplikatif untuk merumuskan kebijakan pengemangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa.
12. Pengembangan kosakata dapat dilakukan dengan menyerap bahasa lain. Jangan hanya mengembangkan bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah. Pengembangan bahasa daerah dapat dilakukan oleh balai/kantor bahasa.
13. Bahasa Indonesia bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan juga menjadi jati diri bangsa. Penumbuhan keimanan masyarakat terhadap bahasa Indonesia perlu diajarkan.



14. Pentingnya peran kesejarahan bahasa Indonesia dalam membangun Indonesia.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Deni Riyadi

Instansi : -

**Pertanyaan:**

Saya teringat orang Rusia membaca *Anna Karenina* dan orang Inggris membaca *Shakespeare*. Mereka bangga menjadi orang Rusia dan Inggris. Adakah karya sastra yang dapat menumbuhkan rasa keindonesiaan?

**Jawaban:**

Tentu ada, inilah yang belum kita tentukan.

**Penanya 2**

Nama : Syahrudin

Instansi : Makassar

**Pertanyaan:**

1. Apakah maksud multilingualisme adalah masyarakat memiliki banyak bahasa atau menggunakan banyak bahasa? Apa definisinya?
2. Ada kata pengelolaan, pengintegrasian, dan pemanfaatan. Aturan kebakuan bahasa kita sudah jelas, yakni *PUEBI*, *KBBI*, dan *TBBI* masih perlukah ada pengintegrasian bahasa itu?

**Jawaban:**

1. Multilingualisme berkaitan dengan kemampuan berbahasa seseorang.
2. Data kebahasaan diintegrasikan dengan sastra, bukan menumpangtindihkan bahasa standar.

**Penanya 3**

Nama : Ria Febrina

Instansi : Universitas Andalas

**Pertanyaan:**

Saya pernah baca kajian penelitian bahasa daerah dapat digunakan menjadi batas wilayah NKRI. Kondisinya, mereka mampu mengganti identitasnya. Misalnya, orang sering mengaku Malaysia dan Indonesia. Di Ampar, ada yang mengaku Melayu Riau. Bahasa Mentawai ternyata masuk rumpun Polinesia berasal dari kedatangan orang Jepang. Ternyata orang Mentawai tidak bangga berbahasa Mentawai, ajarkan kami tentang Indonesia dan Minangkabau. Strategi apa yang perlu kita lakukan untuk menumbuhkan kecintaan pada bahasa?

**Jawaban:**

1. Orang Papua sengaja diprovokasi bahwa mereka lebih dekat Polinesia, Mikronesia, dan Melanesia. Mela nesos adalah pulau yang didiami oleh orang-orang berkulit hitam. Konferensi ini dihadiri banyak orang. Pernah ada Festival



Melanesia di Papua sampai NTT, ini berbahaya karena dapat terjadi disintegrasi bangsa. Pernah ada gerakan Melanesia Raya.

2. Ada buku Tanah Air Bahasa Indonesia. Di situ dikatakan Indonesia dan Melayu sama, hanya beda nama. Saya tidak setuju. Indonesia hanya berakar dari Melayu.
3. Ada istilah yang menyatakan better English, better income, padahal ini bohong. Tidak ada hubungan antara bahasa dan jumlah pendapatan.
4. Jika mau membunuh sebuah bangsa, bunuh bahasanya.
5. Bahasa Indonesia identik dengan NKRI, sedangkan bahasa daerah identik dengan kebinekaan. Peran strategis bahasa daerah adalah memberikan asal-usul pertalian kita. (kekerabatan bahasa). Contoh, dua, rua, loro. Pembentukan dari rua > ro > roro > loro. Kita memang beda, tetapi kita satu asal. Tunjukkan bahasa-bahasa daerah yang satu rumpun Austronesia.
6. ni, gi, di; n > d (sama-sama alveolar) > g (sama-sama bersuara)
7. Seharusnya tidak perlu sayembara menulis cerita anak. Badan Bahasa harus membuat hierarki kebahasaan untuk cerita anak.
8. Bahasa baku itu tidak ada penuturnya, itu hanya akal-akalan supaya kita laku. Bahasa baku penting dalam pembelajaran.

#### **Penanya 4**

Nama : Andis

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar

#### **Pertanyaan:**

1. Mana yang lebih baik, memekarkan kosakata bahasa Indonesia dari bahasa asing atau bahasa daerah?
2. Saya memandangkan Bugis Wajo dan Bugis Pontian di Malaysia. Mengapa bahasa Bugis di Malaysia bisa bertahan, padahal penutur di Pontian tidak pernah berkontak dengan penutur Bugis di Wajo?

#### **Jawaban:**

Proses migrasi menyebabkan persebaran yang berkonsentrasi di suatu tempat. Hal yang menarik adalah studi migrasi. Bandingkan dengan leksikostatistik dan kosakata dasar Swadesh. Untuk melihat kosakata budaya, tidak cukup dengan Swadesh saja.

Asal-usul Austronesia bukan berasal dari Indocina, melainkan dari Papua. Menurut teori, bahasa asal manusia berkonstruksi aktif. Konstruksi bahasa Indocina itu pasif, sementara Papua aktif. Bima Dompu mengenal konstruksi aktif dan pasif. Di Papua, bilangan pokoknya sederhana, maksimal lima. Di Bima, bilangan pokoknya sampai 10, Sumbawa 20, dan Jawa 30.

#### **Isu-Isu Penting:**

1. Seharusnya, Badan Bahasa bertugas membuat kebijakan kebahasaan dalam kerangka keindonesiaan, bukan meneliti seperti perguruan tinggi. Boleh lakukan penelitian atau riset, tetapi yang aplikatif untuk merumuskan kebijakan pengembangan, perlindungan, dan pembinaan.
2. Badan Bahasa harus membuat hierarki kebahasaan untuk cerita anak. Hal ini penting dilakukan agar buku cerita yang disusun sesuai dengan kemampuan anak.



3. Belum ada kesepakatan karya sastra Indonesia yang dapat menumbuhkan rasa keindonesiaan.
4. Pengembangan kosakata dapat dilakukan dengan menyerap bahasa lain. Jangan hanya mengembangkan bahasa Indonesia, tetapi bahasa daerah juga harus menyerap bahasa lain. Ini tugas balai kantor daerah untuk mengembangkan bahasa daerah.
5. Kita harus percaya bahwa bahasa Indonesia identik dengan keindonesiaan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa (NKRI), Sementara bahasa daerah adalah bahasa yang menunjukkan kebinekaan bangsa Indonesia.
6. Peran strategis bahasa daerah adalah memberikan asal-usul pertalian kita.
7. Seharusnya, laboratorium kebinekaan dapat mengintegrasikan kekerabatan bahasa dan budaya di seluruh nusantara sehingga masyarakat dapat memahami bahwa kita berbeda-beda, tetapi bersumber dari satu akar yang sama.



### **3. Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Bahasa dan Sastra Daerah**

Judul	: Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Bahasa dan Sastra Daerah
Pembicara	: James Modouw
Hari, Tanggal	: Selasa, 30 Oktober 2019
Pukul	: 13.45—15.15
Moderator	: Drs. Agus Sri Danardana, M.Hum.
Pencatat	: Anita Astriawati Ningrum

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, makalah yang akan saya sajikan saya sangat sederhana. Saya akan fokuskan pada mekanisme kerja pusat dan daerah. Intinya, apa yang akan dikerjakan oleh pusat dana apa yang akan dikerjakan daerah. Begitulah garis besarnya. Kita tidak perlu berdiskusi panjang lebar, saya akan berbicara pada tataran garis besarnya saja dan Pak Fugo yang akan membahasnya lebih dalam lagi. Baik, kalau kita bicara mengenai pembagian kerja, kerangka acuannya selalu regulasi. Banyak regulasi yang sudah mengatur tentang pembagian mekanisme kerja pusat dan daerah. Kalau kita lihat satu per satu, mulai dari undang-undang sampai pada petunjuk atau pedoman teknisnya peraturan yang paling teknis, dapat kita bisa liat pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 dan Peraturan Mendagri Nomor 40 Tahun 2007.

Pedoman terbaru mengatur lebih spesifik tentang mengatur pembagian kerja pusat dan daerah. Pemerintah pusat bertugas melakukan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia. Dengan demikian, bahasa dan sastra Indonesia itu sudah menjadi tugas pokok pemerintah pusat. Sementara itu, untuk bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas kabupaten/kota itu harus dikelola oleh provinsi, seperti bahasa Sunda karena lintas kabupaten dan kota. Misalnya, Pemerintah Kota Bogor memiliki perda sendiri. Begitu pula dengan kabupaten yang dapat membuat perda sendiri. Padahal, mereka semua mengelola bahasa Sunda. Hal ini akan memicu tarik-menarik kepentingan yang harusnya diatur oleh provinsi. Ini harus diatur oleh provinsi.

Prinsipnya, bahasa yang penuturnya lintas kabupaten dan kota menjadi kewenangan pihak provinsi. Hal ini sesuai dengan empat prinsip pembagian tugas, yaitu efektif dan efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas, serta strategis. Dampak eksternalnya harus terletak pada pemerintahan yang dapat mengelola dampak eksternalitasnya. Kemudian yang keempat strategis. Strategis dalam arti bahwa hal-hal yang urusannya strategis menjadi lingkup kerja itu harus dikendalikan oleh level pemerintahan pada tingkatan tersebut. Dan kita lihat daerah membina bahasa dan sastra yang penuturnya di dalam daerah tersebut tidak keluar lagi dari daerah itu. Hal seperti ini banyak sekali terjadi di luar Jawa, terutama di Papua. Banyak sekali seperti ini. Satu kabupaten ada bahasa-bahasa lokal yang penuturnya hanya ada dalam kabupaten itu. Seperti tempatnya Pak Toha yang sekrang sudah pindah ke Bali. Dia mengatakan bahwa di kota tempat tinggalnya, ada lima bahasa lokal. Selanjutnya, kita tahu bahasa tidak akan lepas dari kebudayaan. Jadi, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur tentang kebudayaan. Prinsipnya sama. Kalau pemangku budayanya itu merata di level kabupaten di dalam satu wilayah provinsi, tugas itu harus ditempatkan di provinsi.



Sementara itu, jika pemangku budaya ruang lingkungannya hanya ada dalam satu kabupaten, itu harus menjadi urusan kabupaten. Perda-perda juga harus dikeluarkan berdasarkan prinsip tersebut. Begitupun kesenian tradisional dan sejarah. Kalau sejarahnya itu lintas waktu dan tempat yang melampaui sebuah wilayah kabupaten/kota, itu harus dikelola oleh pemerintah provinsi. Namun itu lingkungannya ada di dalam wilayah kabupaten itu tetapi sejarah itu mempunyai makna dan nilai yang tinggi itu harus dikelola oleh pemerintah kabupaten tersebut. Kemudian, kalau perlindungan bahasa diatur diatur Undang-Undang Nomor 24, kemudian PP Nomor 57, sudah mengatur teknisnya. Namun, yang jadi masalah buat kita saat ini adalah penutur, terutama generasi milenial, mereka gengsi sekali kalau menggunakan bahasa daerahnya. Mereka cenderung cari *westernisasi* dengan menggunakan bahasa asing terkesan lebih keren. Jadi, ini yang harus kita kelola. Penumbuhan bahasa daerah awalnya harus dari keluarga. Kalau tadi kita lihat seminar dalam materi utama di depan. Jika terjadi perkawinan silang atau asimilasi itu terjadi kebingungan pemilihan bahasa dalam keluarga itu. Misalnya, penutur bahasa Sunda kawin dengan penutur bahasa Jawa, bahasa mana yang akan digunakan di situ. Apakah keduanya dipakai sebagai bahasa sehari-hari? Ataupun saling berebut?

Hari ini pakai bahasa Sunda, lalu besoknya pakai bahasa Jawa. Nah, inilah masalah-masalah yang perlu kita pikirkan ke depan. Bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti itu. Namun slogan yang disampaikan oleh Badan Bahasa sangat bagus, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kepada anak-anak kita generasi milenial, memang kalian harus kuasai bahasa asing. Namun, rawat bahasamu sendiri karena itu jati diri kalian. Apalagi di dalam bahasa daerah banyak sekali kearifan-kearifan. Kearifan yang menyangkut filosofi itu sangat kaya dan sangat banyak. Jika orang terlepas dari bahasa daerah, kearifan-kearifan dan filosofi hidup yang membawa suku bangsa sampai pada tahapan sekarang itu akan hilang semua dan siapa yang bertanggung jawab kalau itu hilang semua? Seharusnya generasi penerusnya yang bertanggung jawab. mungkin makna-makna ini yang harus kita lestarikan. Kita lihat gubernur dan bupati. Gubernur itu membina bupati untuk melaksanakan tugas pelestarian bahasa daerah. Lalu, kita lihat datan Badan Bahasa. Siapa yang paling banyak bahasanya? Ya. Tanah Papua.

Nah, itu baru kelihatan, ya. Itu pemerintah provinsi ada, tetapi pemerintah kabupaten/kota juga ada. Artinya, bahwa ada peraturan-peraturan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah perlu penataan kembali. Misalnya, pemda kota dan kabupaten yang sudah punya peraturan-peraturan ini yang tadinya mereka pikir bahwa dengan peraturan itu mereka bisa melestarikan itu sendiri, tetapi kalau penuturnya meluas lebih baik kita pakai peraturan di atasnya sehingga itu bisa dikolaborasi antara pemerintahan daerah. Ini yang provinsi yang sudah ada, pemda kabupaten/kota juga yang sudah ada, tetapi mungkin data yang di sini kurang, tetapi bukan itu maksud saya. Saya hanya akan menunjukkan bahwa kalau penuturnya lewat wilayah kabupaten/kota, melintasi kabupaten/kota, itu harus diatur oleh provinsi. Akan tetapi, kalau itu penuturnya hanya ada pada lingkup wilayah kabupaten, itu diatur oleh pemerintah kota dan kabupaten dan peraturan-peraturannya.

Nah, tentu untuk pemetaan dan pengkajian bahasa, teman-teman dari bidang bahasa lebih fasih tentang itu. Ini ada garis besarnya di sampaikan oleh teman-teman dari Badan Bahasa, kita bisa lihat ada pemetaan, ada kajian vitalitas, ada



konservasi, ada revitalisasi, dan ada peta bahasa, dan registrasi bahasa dan sastra. Itu yang perlu kita lakukan. Nanti, ini yang kita hasilkan waktu rapat kerja perencanaan bahasa daerah di Papua dan Papua Barat tanggal 31 Agustus. Tahapannya kita bisa lihat pada tahapan bahasa, ini kegiatan, kegiatannya melakukan kajian peta bahasa dan nilai persebaran penutur dan vitalitas. Hasilnya seperti itu. Kesepakatan atas bahasa lokal yang dipilih untuk diajarkan dalam mulok, bahasa standar lokal di setiap tujuh wilayah budaya adat. Kemudian standardisasi bahasa yang terpilih, melakukan kajian sosiolinguistik, yaitu pemilihan dialek yang menjadi standar di sini, maksudnya untuk Papua khusus ini dalam strategi untuk penyederhanaan bahasa-bahasa sebagai bahasa dominan, dan bahasa-bahasa ibu kepada daerah-daerah lokal.

Kemudian kita lihat kedudukan bahasa dan sastra ini dalam renstra kemendikbud. Fungsinya seperti ini. Bahasa sebagai sarana berpikir dan pencerdasan bangsa, sebagai pengantar pendidikan, pembentuk karakter, alat strategi diplomasi, kebanggaan dan citra bangsa, pemersatu bangsa, sarana ekspresi budaya. Nah, dengan begitu banyaknya kedudukan dan fungsinya tentu saya pun bukan orang yang pada bidang bahasa, saya sangat menghargai bahasa. Penting sekali kita kuasai dan kita lestarikan bahasa-bahasa daerah, juga bahasa nasional. Saya menawarkan bentuk identitas pelaksanaan pusat dan daerah dalam pelestarian, perlindungan bahasa dengan konsepsi seperti ini. Jadi, kita harus bagi tugas. Pemda kerja apa, pusat kerja apa. Pusat kita ada punya UPT-UPT sehingga kajian, identifikasi, dan pemetaan ini dikerjakan di pusat bersama dengan UPT-UPT sampai kajian vitalisasi, konservasi, dan dokumentasi, dilakukan di pusat. Kemudian daerah melakukan pembinaan, pemanfaatan, sampai penghayatan dan pewarisan bahasa itu sendiri sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak, kita akan kesulitan memobilisasi sumber daya yang kita punya, terutama para ahli dan juga modal. Kalau di sini tentunya harus bekerja sama dengan Perguruan Tinggi. Nanti, di bawah ini juga Perguruan Tinggi juga terlibat untuk melakukan bagian yang hilir ini.

Jadi, saya selalu menawarkan kerja hulu hilir. Jadi, Pak, siapa? Pak Toha ini sudah dari dulu menjuluki saya hulu hilir, ya, Pak, ya. Kerja hulu hilir. Nah, demikian juga bahasa yang statusnya mulai terancam sebaiknya dapat diperkuat kembali atau revitalisasi, melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. Yang sudah banyak sekali dilakukan itu, orang selalu mencoba menjadikan dia sebagai muatan lokal di berbagai tempat. Namun, kembali lagi muatan lokal ini dengan model pendidikan yang kita yang sangat formalitas seperti ini, dia tidak melihat pendidikan bahasa ini sebagai satu alat untuk melestarikan tetapi banyak alat sebagai pengetahuan.

Oleh sebab itu, lebih bagus kita kembangkan dalam pendidikan nonformal pada sanggar-sanggar budaya, pada sekolah-sekolah adat, atau apa di PKBN, di bidang lebih banyak ke nonformal dan itu diberikan kewenangan kepada masyarakat setempat untuk mengembangkan atau melestarikan atau juga mendukung kegiatannya. Nah, simpulannya seperti yang tadi saya katakan, kerja hulu di kementerian/lembaga dengan perguruan tinggi. Kemudian, kerja hilir oleh pemerintah daerah dan juga dipantau oleh perguruan tinggi. Belum sampai 25 menit ya? Ya, mungkin itu saja paparannya.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : James Modouw, Ph.D.  
Judul Makalah : Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Bahasa dan Sastra Daerah  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2019  
Pukul : 13.45—15.15  
Moderator : Drs. Agus Sri Danardana, M.Hum.  
Pencatat : Anita Astriawati Ningrum

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Pembagian kewenangan berarti kerangka acuannya adalah regulasi (UU beserta pedoman teknis lain).
2. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan tentang bahasa dan sastra berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
3. Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.
4. Pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
5. Pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang terhadap pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya satu daerah kabupaten/kota.
6. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, kebijakan penanganan bahasa dan sastra daerah diarahkan pada tiga tindakan, yakni perlindungan, pengembangan, serta pembinaan bahasa dan sastra daerah.
7. Pemerintah membagi urusan bahasa dan sastra daerah antara pusat dan daerah seperti yang diatur dalam PP No. 57/2014.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Rasyidi  
Instansi : Bogor

**Pertanyaan:**

Kota Bogor telah memiliki peraturan wali kota yang mengatur tentang kebaasaan, tetapi dukungan anggaran sangat minim.

1. UU Nomor 24 tahun 2009 perlu memiliki aturan turunan karena peraturan pemerintah yang ada sekarang belum jelas.
2. Diperlukan surat edaran, keputusan menteri, ataupun keppres agar tiap daerah dapat membuat regulasi.
3. Perlu ada kejelasan antara tugas pusat dan daerah, terutama mengenai anggaran.

**Jawaban:**

Pihak pusat berkonsentrasi pada ranah yang sifatnya kajian ilmiah, sedangkan pemerintah daerah bekerja pada pembinaan dan pelestarian. Perguruan tinggi harus membantu hulu dan hilir.





**Penanya 2**

Nama : Imelda

Instansi : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

**Pertanyaan:**

1. Saya tidak setuju dengan adanya wacana pemilihan satu bahasa untuk mewakili satu provinsi seperti pada masa Orde Baru. Kebijakan ini sangat kontraproduktif.
2. Pemerintah Provinsi Papua terkesan tidak peduli dengan budayanya. Mereka masih sibuk mengurus ekonomi, padahal budaya merupakan potensi ekonomi.

**Jawaban:**

1. Bahasa berkaitan dengan teori dominasi budaya.
2. Harus dibangun satu sistem bahasa setara.



#### 4. Pengelolaan Bahasa dan Sastra Daerah

### PENGLOLAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

#### Saut Poltak Tambunan

#### Sastrawan

#### PENGANTAR

Semua orang sepertinya tidak banyak yang risau ketika tahun 2011, seorang pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa pada akhir abad ke-21, dari 746 bahasa daerah yang masih ada di Indonesia diperkirakan hanya akan tersisa 10%. Itu berarti hanya akan tersisa 75 bahasa daerah. *VOA Indonesia* memberitakan hal ini pada 23 September 2011. Pertanyaan pertama yang segera muncul adalah seperti apakah keberagaman budaya kita nanti?

Begitu pula ketika Unesco pada 17 November 1999 menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Internasional Bahasa Ibu. Di Indonesia, Hari Bahasa Ibu nyaris tidak terdengar gaungnya. Padahal, sebagian besar anak bangsa ini belajar bicara dari bahasa daerah yang dalam artian sastra adalah Bahasa Ibu (*mother tongue*).

Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan bahasa dan sastra daerah, konservasi dan revitalisasi menjadi sebuah keniscayaan. Sastra modern berbahasa daerah harus digiatkan karena sangat potensial untuk melestarikan bahasa. Salah satu hal yang membuktikan hal tersebut, misalnya sastra modern berbahasa Batak yang telah membangkitkan kembali gairah berbahasa Batak.

#### BAHASA DAERAH DI TENGAH MODERNISASI

Kehadiran bahasa daerah di tengah modernisasi, tak bisa lepas dari kekhawatiran terhadap ancaman kepunahan. Pada era global ini tidak ada bahasa daerah yang luput dari ancaman, termasuk bahasa Jawa dan Sunda yang jumlah penuturnya mencapai 68.044.660 orang dan 32.412.752 orang. (*Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia, Pusbanglin – Badan bahasa, 2017*).

Di banyak pelosok, bahasa daerah sebagai bahasa ibu digantikan oleh bahasa Indonesia dengan aksentuasi kedaerahan. Bahasa daerah sebagai bahasa ibu ataupun bahasa percakapan sehari-hari semakin ditinggalkan oleh penuturnya. Anak-anak sejak dini dibiasakan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan bahasa asing dianggap lebih perlu dibandingkan bahasa daerah.

Bahasa Indonesia yang kita sepakati sebagai bahasa persatuan menjadi pemangsa bagi kosakata asli bahasa daerah. Semua bahasa daerah mengalami tekanan yang sama. Di daerah Batak, misalnya, bukan karena *onan* 'pasar tradisional' telah ditutup sehingga tak ada lagi penjual *lasiak* atau *lasinga*, *alia*, *halas*, *parmasak*, *palia* atau *parira*, *joring* dan yang lainnya. Namun, hal ini disebabkan telah terjadi pergantian nama menjadi cabai, jahe, lengkuas, lada, pete atau *pote* dan jengkol. Tidak hanya itu, banyaknya penyakit seperti *ngenge*, *darang*, *labi-labi*, *arunon*, *sanggulan*, *mongkol*, dan penyakit lainnya yang lenyap dari tanah Batak bukanlah bukti dari suksesnya program Indonesia Sehat. Namun, karena orang menyebutnya sebagai cacar, eksem, cacingan, demam, campak, batuk, dan yang lainnya.

Perubahan gaya hidup dalam modernisasi turut mempercepat hilangnya banyak kosakata asli daerah dalam percakapan. Generasi Batak milenial (zaman *now*) tidak lagi mengetahui apa yang disebut *mamiari* (menampi beras), *sobuon* (ujung tajam



kulit padi), dan *monis* (serpihan kecil beras). Mereka juga tidak tahu lagi *soban* (kayu bakar), *para-para* (tempat kayu bakar di atas *tataring* atau tungku), *siudut hosa* (tabung bambu kecil alat untuk meniup bara jika api padam), *hudon*, (periuk), *purik* (tajin), *mangariri* (mengurangi air tajin dari adonan nasi), *manghariar* (mengaduk adonan nasi dengan tangkai *sonduk dasar* atau tangkai centong tempurung), *hurhur* (kerak nasi), dan yang lainnya. Kurang lebih dua puluh kata dalam bahasa Batak hilang ditelan teknologi baru menanak nasi, bernama *rice cooker*.

Dahulu *marsoban* (mencari kayu bakar ke hutan) adalah sarana untuk mempererat hubungan pertemanan bagi remaja. *Manulu api* atau menyulut (meminta) api dari tungku tetangga adalah tradisi yang indah, ekspresi kerukunan dengan tetangga. Semua itu kini telah hilang. Tidak banyak lagi orang menggunakan kayu bakar untuk memasak, diganti dengan kompor gas elpiji. Hilanglah pula kata *marsoban* dan *manulu api* serta banyak kata turunannya.

Bahasa dan sastra daerah muncul juga dalam nama-nama khas suku penuturnya. Pada orang Batak, nama adalah semacam doa, impian, dan harapan. Saut Poltak, misalnya, yang memiliki makna jadilah terbit/purnama. Ada pula Sabam Maruli Asi (kesabaran yang mendatangkan sukacita dalam kasih), Jojo Marito (semoga berikutnya memiliki adik perempuan atau laki-laki secara berturut-turut), Luhut Binsar (terbit seluruh), Tahi Bonar (rancangan kebenaran), Partogi (pemimpin), Haposan (orang kepercayaan), dan Marisi Dame (penuh kedamaian).

Seiring modernisasi, penamaan anak telah mengalami perubahan. Orang-orang tua tidak lagi memberi nama Batak kepada anaknya, misalnya memberi nama anaknya dengan Beckham, Ronaldo, Sharapova, Whitney Houston, Celine Dion, Leonardo Caprio, Justin Biebr, Richard Max atau mengambil nama dari film, sinetron, olahraga, dan selebritas lainnya. Selain itu, ada juga penggunaan nama dari suku lain, seperti Djoko, Rahayu, Bambang, dan Sri Sulastri.

Semakin banyak orang enggan atau malu menunjukkan identitas primordialnya. Seseorang sering dianggap hebat jika sudah tidak tampak lagi ciri dan karakter keaslian sukunya. Kondisi ini mendorong banyak orang berusaha menyembunyikan ciri-ciri etnisnya.

Di kampung-kampung, berbahasa Indonesia menjadi bagian gaya hidup. Berbahasa daerah sering dianggap sebagai penghambat proses asosiatif dengan interaksi sosial yang harus dihadapinya di negeri orang saat harus merantau ke luar daerah. Berbahasa daerah dianggap sudah anakronis, ketinggalan zaman, bahkan keliru zaman.

Salah satu biang keladi merosotnya penggunaan bahasa daerah adalah modernisasi. Di dalamnya ada urbanisasi, pernikahan antaretnis (*amalgamation*), dan akulturasi terhadap lingkungan sosial heterogen dan multietnis. Termasuk teknologi informasi yang umumnya serba-Inggris, pendidikan serta pengetahuan diantarkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Kondisi ini diperburuk dengan marginalisasi pendidikan bahasa daerah di sekolah. Pendidikan bahasa lokal, jika masih ada, dipandang hanya pelengkap kurikulum dan tidak begitu menentukan keberhasilan pendidikan. Buku-buku baru atau media cetak berbahasa daerah pun semakin langka. Bahkan, ada sekolah yang melarang muridnya berbahasa daerah di sekolah.

Di banyak daerah, nyaris tidak ada institusi resmi yang merasa wajib dan konsisten mengawal bahasa daerah. Seperti bahasa Batak, yang selama ini dikawal



oleh lembaga adat dan agama. Hal serupa juga terjadi pada gereja di kota besar yang mulai menjaga jarak dengan bahasa daerah.

Modernisasi memang melukai tradisi. Kita tidak perlu menuding siapa pun. hanya kita penganut tradisi itu yang harus melestarikannya. Akankah kita biarkan bahasa daerah punah karena ditinggalkan oleh penuturnya? Haruskah bahasa daerah punah demi bahasa persatuan Bahasa Indonesia yang kita banggakan itu?

### **MOMENTUM KEBANGKITAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH**

Sesungguhnya, pernyataan Kemendikbud pada tahun 2011 adalah peringatan atau *woro-woro* bagi setiap pemangku kepentingan budaya. Jika kebudayaan adalah tentang akal dan budi, tentang karsa, rasa, dan cipta, bahasa adalah ‘darah’-nya, bahasa dan sastra adalah pola pikir, pola hidup, dan tata nilai. Bahasa daerah adalah sejarah dan identitas etnis yang menunjukkan keberagaman kita, serta menjadi ‘ruh’ kearifan lokal yang mewarnai kebudayaan daerah dan menjadi kekayaan negeri ini. Apa yang akan terjadi bila kebudayaan daerah tanpa bahasa daerah?

Pasal 32, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara harus menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ini berarti, UUD 1945 sudah mengamanatkan tanggung jawab dan peranan pemerintah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa daerah. Regulasi ditetapkan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Regulasi tersebut, di antaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah; serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Setelah *woro-woro* tahun 2011, terdapat delapan peraturan gubernur yang diterbitkan antara tahun 2013 sampai dengan 2015, termasuk Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Terdapat empat belas provinsi yang sudah menerbitkan peraturan daerah, tujuh di antaranya diterbitkan sebelum tahun 2011. Bali mendahului dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali. Peraturan daerah terbaru dari Sumatra Utara dengan Perda Nomor 17 Tahun 2017. Di tingkat bupati/walikota, ada 6 peraturan, 5 peraturan di antaranya terbit antara 2011–2017.

Sebenarnya, regulasi ini relatif sedikit dibandingkan dengan 746 bahasa daerah di 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Namun, catatan ini setidaknya menunjukkan bahwa setelah tahun 2011, beberapa pemerintah daerah menaruh perhatian untuk melestarikan bahasa daerah. Tentu bisa diteliti apakah ada kaitannya dengan *woro-woro* Kemendikbud pada tahun 2011. Kefektifan pelaksanaannya juga masih tanda tanya sebab kondisinya tidak sama di tiap-tiap daerah.

Woro-woro Kemendikbud tersebut pernah diharapkan berkembang menjadi momentum nasional kebangkitan bahasa dan sastra daerah. Momentum ini yang menjadi pemicu saya untuk sementara meninggalkan sastra nasional (bahasa Indonesia) yang saya tekuni sejak 1973. Akhir tahun 2011, saya beralih merintis penulisan sastra modern pertama dalam bahasa Batak Toba, setidaknya dalam enam



puluh tahun terakhir. Buku yang pertama terbit adalah kumpulan cerita pendek *Mangongkal Holi* yang terbit pada Maret 2012.

Penggerusan terhadap bahasa daerah diharapkan akan terbendung, jika momentum kebangkitan ini dapat menjangkau para sastrawan nasional. Mereka perlu didorong agar juga berkarya dalam sastra daerah.

## **PENYELAMATAN BAHASA DAERAH**

Seorang sastrawan senior, Ajip Rosidi merintis pemberian Penghargaan Sastra Rancage yang berlangsung setiap tahun sejak 1989. Berarti sudah hampir 30 tahun. Ajip Rosidi mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk sastra daerah. Tidak hanya bahasa Sunda, tetapi juga bahasa daerah di seluruh nusantara.

Saya meraih Penghargaan Rancage pada 2015, kali pertama untuk sastra daerah Batak. Penyerahan hadiah dilakukan seminggu sesudah peresmian gedung megah Perpustakaan Ajip Rosidi di jalan Garut Bandung. Saya beruntung mendapat kesempatan memberi sambutan mewakili para penerima penghargaan. Saya sampaikan bahwa di negeri yang ‘sakit minat baca’ ini, kita butuh lebih banyak ‘Ajip Rosidi’.

Pada tahun 2016, ada tiga serangkai imbauan yang saya temukan pertama pada spanduk di seberang halaman SMA Negeri 1 Siborong-borong Sumatra Utara. Ketika itu saya mengantarkan sumbangan buku-buku berbahasa Batak. “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarkan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing”.

Indah, optimistis, dan menggembirakan. Tentang bahasa Indonesia, tentu sudah kita utamakan bahkan merasuk jauh ke benak anak-anak usia dini. Bahasa asing pun sudah menggiring langkah kegiatan kita di segala tempat dan waktu, bahkan sejak taman kanak-kanak pun anak-anak sudah diajarkan bahasa asing. Ada banyak kawasan dan ruang publik di negara ini yang justru mengutamakan bahasa asing dan menganak-tirikan bahasa Indonesia, terutama di kota besar. Di daerah Serpong, Tangerang, misalnya, ada kawasan hunian termasuk mal besar yang sangat pelit berbahasa Indonesia dalam menuliskan nama jalan, papan iklan, nama toko, restoran dan lain-lain. Serasa bukan di Indonesia.

Lalu, bagaimanakah cara melestarikan bahasa daerah? Apakah cukup dengan imbauan? Seorang tokoh budiman mendirikan sekolah di Sumatra Utara. Ia memberitahu kepada saya bahwa di sekolahnya dilarang berbahasa daerah. Artinya, tentu murid akan dihukum jika ketahuan. Ini memprihatinkan.

Bahasa daerah memang tidak diutamakan dalam mencari pekerjaan, tetapi bahasa daerah akan mengantarkan anak didik ke pintu utama ruang-ruang budaya etnik. Banyak kearifan lokal dan nilai luhur tradisional yang hanya tepat ditransformasikan lewat bahasa daerah dan itu akan membentuknya menjadi seseorang dengan pribadi yang teguh dan tangguh. Itulah karakter yang diperlukan kelak saat mencari pekerjaan. Pudarnya minat bertutur dalam bahasa daerah menyebabkan hilangnya banyak kearifan lokal.

Ada 7000 bahasa di dunia, yang 50% di antaranya terancam punah. Pada 21 Februari 2009, UNESCO merilis bahwa 2500 bahasa di dunia terancam punah, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia. 200 bahasa telah punah dalam 30 tahun terakhir dan 607 tidak aman (materi diskusi Kepala Bidang Pelindungan, Dr. Ganjar Harimansyah, peluncuran buku cerpen bahasa Batak *Toektak Mandoeda Eme*, Juni 2018).



Beruntunglah bahasa daerah di pulau Jawa dan Bali karena semua provinsi di pulau ini sudah menerbitkan pergub untuk pengembangan dan pembinaan bahasa daerah. Bahasa Jawa dan Sunda memiliki jumlah penutur terbesar, juga memiliki majalah berbahasa daerah. Pada bahasa Jawa antara lain terdapat *Jayabaya*, *Panyebar Semangat*, *Djaka Lodang*, *Sempulur*, dan *Jagad Jawa*, meski penyetianya semakin menyusut. Beberapa lainnya sudah tak terbit.

Bahasa Sunda lebih beruntung lagi. Tercetak dalam ingatan sekian banyak nama majalah, koran atau tabloid berbahasa Sunda, seperti *Mangle*, *Cupumanik*, *Sunda Midang*, *Galura*, *Cakakak*. Belum lagi majalah majalah 'Persib' seperti *Persib Euy!*, *Nu Aing*, *Persib Magz*, *Bobotoh* dan *Make Manah*.

Melestarikan bahasa daerah tidak cukup dengan himbuan. Tidak cukup dengan membubuhkan tanda 'like' di media sosial. Tidak bisa seperti lagu *Anak Medan* yang membiarkan 'pohon pinang tumbuh sendiri' karena sebaliknya bisa layu lalu mati sendiri. Pada umumnya, sastra daerah didominasi oleh dongeng hikayat, pantun, dan nyanyian. Buku berbahasa daerah mutlak diperlukan. Sementara, penulis berbahasa daerah sangat kurang dan penurunan minat baca terus terjadi.

Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dengan masyarakat sastra untuk melakukan konservasi dan revitalisasi terhadap bahasa daerah. Dukungan dan bantuan penulisan buku sastra modern berbahasa daerah adalah keniscayaan, termasuk penyebarannya ke perpustakaan sekolah dan rumah/taman bacaan masyarakat. Bahasa daerah harus dimasukkan sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Kepala daerah serta anggota dewan perwakilan seharusnya aktif berbahasa daerah, terutama di kabupaten. Jangan lagi ada bupati yang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh rakyatnya karena tidak paham bahasa daerah.

## **TANGGUNG JAWAB PEWARISAN BAHASA DAERAH**

*Tarombo* atau silsilah orang Batak, mungkin bisa masuk rekor dunia sebagai *family tree* terbesar di dunia. Tak ada orang Batak yang tak bisa dicari dalam silsilah. *Tarombo* terjaga karena dirawat dengan disiplin dalam mencatat setiap kelahiran anak laki-laki (patrilinear). Pewarisan silsilah bagi seorang lelaki Batak akan terputus jika tidak memiliki keturunan laki-laki.

Pewarisan bahasa daerah juga bisa dianalogikan seperti itu. Bahasa daerah yang diwarisi turun-temurun akan terputus dalam sebuah keluarga apabila tidak diturunkan kepada keturunannya.

Jargon *kawe-kawean* sering dipinjam untuk menjelaskan vitalitas dan tanggung jawab pewarisan bahasa daerah. Sebutlah kategori *ori* (orisinal) bagi mereka yang fasih berbahasa daerah. Modernisasi yang merasuk dalam keluarga akan melahirkan calon-calon orang tua *kw 1*, yaitu mereka yang lidahnya sudah kaku berbahasa daerah. *Kw 1* akan melahirkan *kw 2* yang pasif, paham bahasa daerah secara terbatas dan tidak mampu mengucapkannya, seterusnya akan melahirkan *kw 3* yang sama sekali tak mengerti apa-apa. Dengan demikian, suatu bahasa daerah diperkirakan mengalami kepunahan hanya dalam tiga generasi setelah *ori*. Jika satu generasi berdurasi 25 tahun, berarti hanya dalam 75 tahun suatu bahasa daerah mengalami kepunahan. Oleh karena itu, mungkin ada benarnya perkiraan Kemendikbud yang menyatakan bahwa bahasa daerah yang tersisa pada akhir abad ini hanya 10% atau 75 bahasa.



## **BAHASA BATAK, SEKARANG DAN NANTI**

Hasil sensus 2010 menyatakan bahwa suku Batak berjumlah 8.466.969 jiwa atau 3,58% dari jumlah seluruh penduduk nasional. Di atas Batak ada suku Jawa (40%) dan Sunda (15,5%) yang menduduki urutan pertama dan kedua.

Pada *Profil Bahasa Daerah di Indonesia* (Pusbanglin, Badan Bahasa, 2017) tercatat bahwa dari 71 bahasa daerah yang sudah dipetakan vitalitasnya, terdapat 5 bahasa daerah di Sumatra Utara yang masuk dalam kriteria stabil, tetapi terancam punah. Selain itu, tercantum pula bahwa jumlah penutur bahasa Batak adalah 3.318.360 jiwa. Jumlah tersebut tidak diperinci, apakah berupa gabungan dari 5 bahasa Puak, (Toba, Karo, Simalungun, Mandailing-Angkola dan Pakpak-Dairi), atau hanya Toba. Sebab menurut Wikipedia '*saat ini diperkirakan terdapat kurang-lebih 2.000.000 orang penutur Bahasa Batak Toba, yang tinggal di bagian barat dan selatan Danau Toba*'. Terutama meliputi 4 kabupaten pemekaran eks Tapanuli Utara di Sumatra Utara, yaitu *Kabupaten Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Toba Samosir*.

Batak adalah satu dari sedikit suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan aksara sendiri. Hal ini bertolak belakang dengan tidak adanya tradisi tulis untuk sastra Batak. Tradisi tulis hanya ditemukan pada kulit kayu (laklak) yang disebut *pustaka*. Bentuknya tersusun berlipat-lipat, berisi aksara Batak dan gambar yang mistis. Karya lainnya terukir pada bambu atau tulang. Tradisi ini pun sudah punah.

Seorang kandidat doktor dari Jerman bernama *Roberta* dalam diskusi Pustaka Batak (literasi Batak) bulan Agustus 2018 di Perpustakaan Nasional Jakarta, mengaku tidak menemukan dongeng (sastra lama) dalam aksara Batak. Aksara Batak hanya digunakan untuk keperluan pengobatan, perdukunan, dan ramalan. Hal ini pula yang mungkin menyebabkan aksara Batak semakin ditinggalkan. Saat ini para penuturnya menggunakan aksara Latin untuk menuliskan bahasa Batak.

Dahulu, sastra Batak hanya berkembang secara lisan dalam sastra lama. Aksara Batak pun tidak digunakan untuk berkomunikasi. Hal-hal tersebut mengakibatkan aksara Batak mudah tergilas budaya pop. Banyak sastra lama yang hilang, seperti *turi-turian, oing-oing, joting, andung-andung*, nyanyian anak-anak saat bermain (*dolanan*), lagu pengantar tidur, dan repertoar gondang Batak. Tidak hanya itu, karena bentuknya tidak tertulis, sebagian sastra lama dalam *umpama* (peribahasa) dan *umpasa* (pantun) jga menjadi tidak jelas atau bergeser maknanya.

Pengajaran di bidang bahasa dan aksara Batak sudah terpinggirkan di sekolah-sekolah. Dr. Uli Kozok, seorang ahli bahasa kuno (filolog) berkebangsaan Jerman, telah membuat aplikasi *font* aksara Batak yang memungkinkan orang dapat mengetik aksara Batak dengan komputer. Meski begitu, minat untuk beraksara Batak tetap rendah.

## **BAHASA BATAK VERSUS BAHASA INDONESIA**

Bangsa ini sudah sepakat untuk menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Namun, bukan berarti melemahkan atau mematikan bahasa daerah. *National Geographic Indonesia* pada 15 Juni 2015 merilis hasil penelitian Tim Komisi III DPD RI tentang empat belas bahasa daerah yang telah punah. Tidak hanya itu, dalam terbitan tersebut juga dirilis bahwa hanya ada tiga belas bahasa daerah yang penuturnya lebih dari satu juta orang, yaitu bahasa Aceh, Batak, Minangkabau, Rejang, Lampung, Sunda, Melayu, Jawa, Madura, Bali, Sasak, Makassar, dan Bugis.



Dalam kunjungan literasi selama dua minggu, pada April 2016, saya berkeliling di empat Kabupaten eks Tapanuli Utara (Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir) yang berbasis bahasa Batak Toba, sambil membagikan sumbangan buku-buku berbahasa daerah kepada lima puluh entitas pendidikan. Saya berkesimpulan bahwa bahasa Batak pada umumnya sudah bukan bahasa ibu di tempat asalnya. Bahasa ibu sudah berganti menjadi bahasa Indonesia yang dituturkan dengan aksentuasi setempat.

Saya menemukan anak-anak di bawah sepuluh tahun yang masih fasih dan santun berbahasa Batak hanya di Huta Balian Sianjur Mula-mula—desa terpencil di balik Gunung Pusuk Puhit. Mereka dibina dan diasuh dengan tekun oleh seorang aktivis muda pelestari budaya Batak, Nagoes Puratus (Richard) Sinaga, di bawah naungan Rumah Belajar Sianjur Mula-mula.

Pembiaran adalah salah satu faktor yang mempercepat runtuhnya budaya. Pembiaran dalam kesalahan berbahasa Batak pun berlangsung masif. Kata dan ungkapan dilafalkan dengan bunyi sekenanya. Hal ini terjadi karena penuturnya jarang atau tidak pernah menemukan kata atau ungkapan itu secara tertulis. Kata *jadi* dilafalkan *jai* atau *jei*. *Dibahen na* dilafalkan dan dituliskan sebagai *benna*, *banna*, *ibenna*, dan *ibanna*. *Mansai* menjadi *saik* atau *sek*. *Gadong hau* menjadi *garingkau*.

Sikap mereka yang bersikeras bahwa merekalah yang benar karena itulah yang didengar sejak masa kecil dan mungkin tidak menemukan kata-kata itu secara tertulis untuk menjadi acuan. Kekeliruan serupa terjadi saat menuliskannya, ditulis seperti bunyinya, misalnya *akka*, *muppat*, *hokkop*, dan *hakkam* yang seharusnya ditulis *angka*, *mumpat*, *hophop*, dan *hamham*. Sekali lagi, pembiaran demi pembiaran terus berlangsung. Tidak ada pihak yang merasa perlu dan berkepentingan atau berkewajiban untuk membetulkannya.

Sastra dalam lagu Batak semakin dangkal, bahkan sarat dengan penggerusan bahasa. Sementara itu, dalam *umpama* (peribahasa) dan *umpasa* (pantun doa dan petuah) banyak menggunakan kata arkais, terutama pada sampiran. Penutur sering tidak paham apa yang dilontarkannya.

Dengan demikian, sama seperti bahasa daerah lain, bahasa Batak semakin termarginalkan. Ditambah lagi hidup sehari-hari yang serba-Inggris. Saat ini, pelajaran yang menggunakan bahasa daerah sebagai pengantarnya sudah tidak ada lagi. Selain itu, kepandaian berbahasa daerah pun tidak menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan.

### **KEBANGKITAN SASTRA MODERN BAHASA DAERAH BATAK**

Saya menjadi pembicara di Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) pada tahun 2011, lalu menjadi kurator UWRF pada tahun 2012. Ketika itu, UWRF disebut-sebut sebagai festival sastra internasional yang terbaik keenam. Suatu kebanggaan menjadi bagian dari perhelatan besar ini. Namun sebaliknya, justru dalam festival inilah saya merasa terpanggil dan tertantang untuk menjawab *woro-woro* Kemendikbud itu.

Saya lalu meninggalkan sastra nasional, merintis jalan sunyi untuk pulang kampung melalui sastra modern berbahasa Batak. Saya menulis novel, cerita pendek, dan puisi berbahasa Batak, sesuatu yang baru untuk bahasa Batak (Toba) dan belum tentu menarik untuk dibaca.





Pada akhir Agustus 2012, kami mendirikan Komunitas Sastra Batak Tortor Sangombas di media sosial. Komunitas tersebut merupakan singkatan dari *Torsatorsa sijahaon sangombas* yang berarti cerita pendek bacaan selintas, semacam *flash fiction*. Melalui komunitas ini, saya berhasil mendapuk para penulis baru dan menerbitkan buku sastra modern berbahasa Batak. Hingga Agustus 2018, Tortor Sangombas sudah berusia enam tahun. Sejak tahun 2015, komunitas ini sudah meraih tujuh Penghargaan Rancage. Penghargaan tersebut, termasuk penghargaan khusus untuk Bupati Serdang Bedagai, Soekirman, sebagai seorang suku Jawa yang menulis cerpen berbahasa Batak—yang bukan bahasa ibunya berjudul *Kumpulan cerpen Serser Sauduran*. Tahun 2017 komunitas ini berubah menjadi Komunitas Sastra Etnik Tortor Sangombas. Hal ini bertujuan untuk menjangkau pegiat sastra daerah lain yang tidak berbahasa Batak.

Sastra daerah Batak sudah bangkit? Setidaknya begitulah menurut pandangan komunitas Tortor Sangombas. Penulis-penulis baru muncul tidak hanya dari komunitas Tortor Sangombas. Saat ini, semakin banyak orang yang sudah tidak ragu menulis dalam bahasa Batak di media sosial. Komunitas berbahasa Batak di media sosial semakin ramai. Kami juga menyelenggarakan lomba menulis cerpen dalam bahasa Batak.

Sejak buku pertama tahun 2012—2018, sedikitnya 20 buku baru berbahasa Batak (Toba) telah terbit dalam bentuk novel, kumpulan cerpen, puisi, dan esai. Lima belas buku di antaranya dari komunitas Tortor Sangombas. Undangan untuk berdiskusi, bedah buku serta baca puisi bahasa Batak diterima dari berbagai komunitas, kampus, sekolah, perpustakaan, dan gereja.

Hal ini memang belum seberapa dibanding dengan 3.318.360 penutur bahasa Batak atau 2.000.000 lebih penutur khusus bahasa Batak Toba. Namun, upaya ini setidaknya sudah berada di garis awal dan jalur yang tepat. Hal ini harus ditingkatkan agar momentum tidak hilang.

Dengan dukungan dan bantuan anggota komunitas, sebagian buku kami sisihkan dan sumbangkan ke sekolah, perpustakaan, dan rumah baca di daerah asal. Sebagian kami jadikan hadiah Natal kepada para penambal ban seputar Jakarta.

Setiap tahun, Tortor Sangombas merayakan Hari Internasional Bahasa Ibu pada 21 Februari dengan diskusi dan peluncuran buku baru berbahasa Batak. Pada tahun ini, komunitas ini Tortor Sangombas melururkan buku puisi *Bangso na Jugul (Panusunan Simanjuntak)* yang menerima Hadiah Rancage 2018. Selain itu, pada tahun ini, kami juga sedang merancang satu buku kumpulan cerita pendek dari lima bahasa Puak Batak berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Namun, sejauh ini kami masih sendirian, belum ada partisipasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Belum ada lembaga yang berinisiatif untuk membantu kebangkitan sastra agar dapat meluas hingga ke tanah asalnya. Bahasa daerah sebagai bahasa ibu sudah tidak lagi diajarkan kepada anak-anak. Faktor tersebut menjadikan pelestarian bahasa daerah yang bermula dari asalnya menjadi hal yang penting dilakukan.

Tradisi lisan mendominasi sastra daerah. Oleh karena itu, selain untuk pencerdasan literasi, pelestarian kearifan lokal, juga berperan penting sebagai acuan tata bahasa dan cara penulisannya. Kata yang sering didengar melalui bunyi pengucapannya akan terbaca dalam tulisan di buku. Oleh karena itu, penulis harus menguasai betul apa yang ditulisnya. Berbeda dengan kesalahan dalam lisan, kesalahan dalam penulisan membutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya.



## KOSAKATA DAN TATA BAHASA DAERAH

Penulisan sastra dalam Bahasa daerah bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini karena kosakata yang sangat terbatas serta tata bahasa yang tidak baku. Memang ada buku referensi dalam pengayaan kosakata dan tata bahasa Batak, seperti *Tata Bahasa Batak Toba* yang disusun oleh Mgr. Dr. Ancietus B. Sinaga OFM Cap dan buku *Bahasa Batak Toba untuk Pemula* yang disusun oleh Drs. Richard Sinaga. Namun, buku-buku ini merupakan pendapat pribadi yang masih bisa diperdebatkan. Saya juga membuat kaidah sendiri dalam menulis buku-buku saya, yang tentu saja perlu mendapat kesepakatan.

Permasalahan bertambah ketika muncul kata yang tak dikenal dalam kosakata Batak. '*Dapur*', misalnya, karena dahulu orang Batak tidak mengenal konsep dapur. Rumah tradisional Batak terbuka tanpa sekat. Ruang makan, dapur, bahkan kamar tidur pun tanpa sekat. Kata-kata seperti itu terpaksa dijelaskan dengan uraian.

Kesulitan kembali muncul saat bersentuhan dengan ilmu pengetahuan dan gaya hidup modern, seperti pembangunan, komunikasi, sekolah, buku, bangku, ruang tamu, makan malam, setrika, dan menyetir mobil. Kata dan ungkapan dari luar bahasa Batak tersebut sering sekali dipakai dengan menggunakan dengan tanda petik atau tulisan miring (*italic*).

Pembentukan kata baru memang perlu. Contohnya adalah kata maaf. Kata maaf tidak ditemukan dalam bahasa Batak. Saya mengajukan *mido anju* sebagai ungkapan baru di komunitas *Tortor Sangombas* untuk mengartikan ungkapan minta maaf. Ungkapan tersebut dapat diterima setelah diskusi panjang. Selanjutnya, dalam komunitas dan buku-buku yang saya tulis, terpakailah ungkapan baru itu.

Saya juga membentuk ungkapan baru lain, seperti *pasiding holang* (menepis jarak), *padimpos holong* (mempererat tali kasih), *manggorga ari sogot* (mengukir hari esok), *maniti nambur* (meniti embun pagi), dan *manapu nipi* (memetik impian). Hal ini saya anggap penting untuk menunjukkan kepada generasi muda bahwa keindahan dan kekayaan bahasa Batak setara dengan bahasa lainnya.

Dalam ungkapan yang saya ajukan terdapat beberapa kata atau ungkapan yang terkesan "merendahkan istri", misalnya, *pardijabu* (orang rumah), *pardihuta* (orang yang menunggu di kampung), dan *parsonduk bolon* (melayani suami). Selain itu, ada juga kata lain yang menyetarakan suami dengan istri, yaitu *ripe*. Namun kati ini kasar, mungkin setara dengan *laki* atau *bini*. Sebenarnya *tunggane doli* dan *tunggane boru* juga menyetarakan, tetapi terlalu formal untuk keseharian. Oleh karena itu, dalam buku terbaru kumcer *Toektak Mandoeda Eme*, saya menyodorkan kata *pardilambung* (orang terdekat di samping). Ini menyetarakan, lalu diterima oleh komunitas dan pembaca buku itu. Sekarang *pardilambung* dipakai dalam komunitas *Tortor Sangombas* untuk mengartikan pasangan suami atau istri.

Berkaitan kekayaan kosakata atau perbendaharaan kata, bisa dibandingkan pada novel dua bahasa yang saya tulis tahun 2012, *Mandera na Metmet* (*Bendera Kecil*). Untuk bahasa Batak (*Mandera na Metmet*) saya memerlukan 18.818 kata dalam 116.250 karakter termasuk spasi. Dalam bahasa Indonesia (*Bendera Kecil*) saya hanya memerlukan 14.411 kata dalam 99.938 karakter. Mungkin karena kosakata bahasa Indonesia masih lebih kaya daripada kosakata bahasa Batak yang saya miliki ketika itu. Atau karena banyaknya kata penghubung pada bahasa Batak, seperti terlihat pada judul *Mandera na Metmet*, harus menggunakan 3 kata sedangkan untuk bahasa Indonesia cukup dua kata, *Bendera Kecil*.



Contoh lain, saya menulis sebuah cerpen kearifan lokal Batak yang kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Dalam bahasa Batak berjudul *Lali Panggora*, menggunakan 2.093 kata. Dalam bahasa Belanda dengan judul yang sama membutuhkan 2.784 kata. Dalam bahasa Inggris berjudul *The Hawk That Heralds Death* menggunakan 2.558 kata, sedangkan dalam bahasa Indonesia berjudul *Elang Pengabar* hanya memerlukan 1.990 kata.

Bisa diteliti lebih lanjut apakah ini menjadi indikator bahwa bahasa Indonesia memang lebih kaya dari bahasa Batak, Inggris, dan Belanda. Atau, kata penghubung pada bahasa Indonesia lebih sedikit disbanding dengan bahasa Batak serta kedua bahasa asing lainnya. Lihat misalnya, kalimat dalam bahasa Batak *di jolo ni jabu ni among ni si Janter* (9 kata), dalam bahasa Indonesia cukup dengan *di depan rumah ayah Janter* (5 kata).

### **KONTROVERSI UNTUK PEMBAHARUAN**

Kelangkaan tulisan dan bacaan berbahasa daerah membuat generasi baru kesulitan untuk mengeja kata aslinya. Bahasa daerah seringkali ditulis sesuai bunyi pengucapannya. Hal ini terjadi di semua bahasa daerah, misalnya, saya tidak tahu apakah *matur suksma* atau *matur suksema* (terima kasih dalam bahasa Bali). Begitu juga tidak tahu mana yang benar, '*moh, emoh* atau *embuh*' (ogah dalam bahasa Jawa).

Tata bahasa Batak banyak mengacu pada *Bibel* berbahasa Batak, yang terjemahan pertama kali dibuat pada akhir abad ke-19. *Herman Neubronner van der Tuuk* (1824-1894) yang saat ini makamnya terbengkalai di Surabaya adalah salah seorang pionir awal penelitian dan peletak dasar linguistika modern atas Bahasa Batak Toba. Meski sekarang ada *Bibel* edisi baru, tetap saja banyak kata yang sudah arkais dan tidak dipahami lagi oleh generasi berikutnya.

Jika konsisten pada tata bahasa yang lazim selama ini, bahasa Batak tidak mengenal tanda penghubung. Kata keterangan pemilik pun digabung menjadi satu. Contoh, *alaman parmeameamannasida*' (halaman tempat bermain mereka). Saya selalu gagap membaca kata ulang pada *parmeameamannasida*, apalagi digabung dengan *nasida*. Selain itu, dalam pengetikan di komputer, kata dengan jumlah 19 karakter seperti ini juga bisa mengurangi keindahan pengetikan sebab akan melompat ke baris berikutnya.

Oleh karena itu, saya memilih untuk menuliskannya dengan *alaman parmeameaman nasida*, sama seperti kaidah bahasa Indonesia dan menggunakan tanda penghubung. Begitu pula dengan *jabumuna* (rumah kalian) saya tulis menjadi *jabu muna* karena *muna* berasal dari *ni hamuna* (milik kalian). *Jabunami* saya tulis menjadi *jabu nami* karena *nami* berasal dari *ni hami* (milik kami).

Selama ini, orang Batak lazim menuliskan [k] menjadi [h]. Alasannya, hal ini mengacu pada bunyi pengucapan dan tidak dikenalnya huruf [k] dalam aksara Batak. Perihal Batak ditulis sebagai *habatahon*, juga *habagahon* (kecantikan), *parserahan* (perantauan). Pendapat saya, karena saya menulis dalam huruf Latin (bukan dalam aksara Batak) dan huruf [k] tersedia dalam aksara Latin, saya akan menuliskannya sebagai *habatakon*, *habagakon*, dan *parserakan*.

Apa yang saya lakukan ini sering menjadi perdebatan (kami sebut pertengkar kreatif) karena dianggap kontroversi. Namun saya yakin, kontroversi adalah benih atau embrio pembaharuan. Bahasa daerah mana pun butuh pembaharuan, butuh revitalisasi. Itu pula sebabnya saya selalu menyerukan perlunya kehadiran



lembaga/majelis bahasa daerah yang memiliki otoritas untuk mengukuhkan kata serapan, bentukan baru, tata Bahasa, dan cara penulisan baru.

### **BAHASA DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL**

Era reformasi mengedepankan hukum sebagai panglima. Namun, terasa kebablasan— karena pranata hukumnya terlalu jauh memasuki ranah kearifan lokal. Di berbagai daerah nusantara, banyak perkara yang sejatinya dapat diselesaikan dengan kearifan lokal diajukan ke pengadilan. Penggeseran patok kebun dan pematang sawah, pencuri buntut sapi, singkong, piring, sandal, sepatu, dan lain-lain, diselesaikan sampai ke pengadilan. Ada orang tua berusia 70 tahun mengadukan ibunya yang berumur 90 tahun karena sengketa tanah. Ada nenek berusia 90 tahun dihukum 18 bulan karena menebang pohon di permakaman. Ada guru ke diseret pengadilan karena mencubit muridnya. Dahulu, selalu ada kearifan lokal yang mampu menyelesaikan perkara seperti itu.

Sengketa tanah biasanya terkait kearifan lokal. Hakim Agung, H. Toton Suprpto, S.H. dalam salah satu lokakarya pertanahan di Jakarta mengatakan bahwa dari 4.048 perkara kasasi yang diajukan penyelesaiannya di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI selama tahun 2001, sebanyak 2.066 kasus (51.04%) adalah kasus sengketa tanah (*satgas-peradilan.com*) Fantastis! Itu pun belum termasuk kasus yang tidak diangkat sampai ke tingkat kasasi. Memang kasus lama, tetapi bisa menggambarkan apa yang terjadi setelah reformasi.

Sudah saatnya kembali ke masyarakat hukum adat dengan kearifan lokal. Lembaga agama dan masyarakat adat harus diberdayakan. Namun untuk kembali mencermati kearifan lokal, satu-satunya pintu masuk yang paling tepat adalah bahasa etnik, bahasa daerah.

### **PENUTUP**

Sastra seharusnya mengembalikan manusia pada hakikatnya. Jadilah orang Indonesia dengan keberagaman khas jati diri dan karakter Indonesia. Saya berharap beberapa usul berikut dapat direalisasikan. Usul tersebut adalah

1. menetapkan payung hukum untuk pengembangan bahasa daerah sebagai bahasa ibu di Indonesia, yang meminta pertanggungjawaban Pemprov, Pemkab/Pemkot untuk melestarikan dan mengembangkannya. Termasuk menyertakannya dalam kurikulum pelajaran bahasa daerah di sekolah, serta membantu penerbitan dan distribusi buku-buku berbahasa daerah, fiksi maupun nonfiksi;
2. menyinergikan pemerintah dengan masyarakat sastra dan bahasa daerah dalam melakukan konservasi dan revitalisasi bahasa daerah;
3. membentuk majelis atau dewan bahasa daerah untuk menjadi acuan literasi berbahasa daerah, seperti tata bahasa, kosakata baru, serta serapan, dan lain-lain.
4. menyusun peraturan bersama antarbupati untuk menetapkan Hari Bahasa Batak. Bisa dimulai dari empat kabupaten eks Tapanuli Utara yang berbasis bahasa Batak Toba. Jika tidak bisa sehari dalam seminggu atau sekali dalam sebulan, bisa dikaitkan dengan hari besar tertentu, misalnya, bertepatan dengan tahun baru sesuai dengan kalender Batak, hari ulang tahun (pemekaran) pemkab, dan Hari Ulos. Pada hari itu Pemkab mewajibkan pemakaian bahasa Batak di sekolah dan kantor di lingkungan Pemkab. Selama ini bahasa daerah



semakin dikerdilkan. Pemangku kepentingan dan pegiat sastra daerah perlu satukan langkah. Kaki kita mungkin kecil dan langkah kita mungkin tidak panjang, tetapi mari kita ayun bersama.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Saut Poltak Tambunan  
Judul Makalah : Pengelolaan Bahasa dan Sastra Daerah  
Hari, Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2018  
Pukul : 13.45—15.15  
Moderator : Dr. Asrif, M.Hum  
Pencatat : 1. Miranti Sudarmaji  
              2. Mukhamdanah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Slogan Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing telah berubah menjadi Memuliakan Bahasa Asing, Menzalimi Bahasa Indonesia, dan mencekik Bahasa Daerah.
2. Bahasa Indonesia yang disepakati sebagai bahasa nasional telah menjadi pemangsa bahasa daerah. Bahasa daerah dianggap ketinggalan zaman dan menghambat interaksi dengan dunia luar.
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kepunahan bahasa daerah, antara lain urbanisasi, pernikahan antaretnis, akulturasi, kelangkaan buku berbahasa daerah, serta banyaknya orang yang enggan atau malu menunjukkan identitas primordialnya.
4. Tahun 2011 merupakan tahun kebangkitan bahasa daerah. Hal ini ditandai dengan terbitnya delapan peraturan gubernur yang mengatur bahasa daerah di Indonesia.
5. Peraturan Gubernur Sumatra Utara yang mengatur bahasa daerah tidak memiliki petunjuk pelaksanaan dalam pengaplikasiannya di lapangan.
6. Jika penutur bahasa daerah hilang, kearifan lokal juga akan hilang. Bahasa daerah membentuk karakter anak-anak menjadi tanggung dan teguh.
7. Sastra modern bukan lagi tentang dongeng, tetapi tentang novel kontekstual.
8. Banyak karya sastra yang hilang karena tidak tertulis.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Fidi Daeri

Instansi : Penulis

**Pertanyaan:**

1. Apa yg dibicarakan saat ini sudah dibicarakan sekian tahun yang lalu dan yang dikeluhkan hampir sama. Pemerintah serius atau tidak karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah?
2. Beberapa tahun yang lalu, ramai dibicarakan ketika sejumlah sastrawan diberangkatkan ke Frankfurt Book Fair (FBF). Mayoritas karya yang dikirimkan adalah karya sastra modern dan posmo, sedangkan yang tradisi mengeluh, tidak ada. Apakah hanya cukup mengeluh? Perlu keputusan yang jelas, apakah semua yang dibicarakan masuk ataukah hanya akan berputar-putar lagi?



**Jawaban:**

Kekayaan dalam bahasa dan tradisi tidak hanya penerjemahan. Pada waktu itu, kita hanya berpikir tentang tradisi yang akan habis. Revitalisasi, misalnya harus didahului dengan penelitian. Namun, terdapat kendala. Misalnya, anggaran penelitian untuk sains dan teknologi lebih besar dibandingkan dengan penelitian-penelitian budaya.

**Penanya 2**

Nama : Ari Ambarwati

Instansi : Malang

**Pertanyaan:**

Masyarakat Papua sekarang sudah sangat bergantung pada beras, padahal dahulunya adalah umbi-umbian dan sagu. Akibatnya, kosakata dan sejumlah budaya juga hilang. Di Bali dan Jatim kasus *stunting* itu rendah? Mengapa? Karena di Bali ada budaya mengantar sesajen dan di Jatim ada *berkatan*. Anak-anak masih dan akan menikmati makanan-makanan yang diperoleh atau disajikan.

Kalau kita sudah menginventarisasi folklor, jangan hanya berhenti diinventarisasi, tetapi harus didokumentasikan, dan diseminarkan. Hilirisasi informasi melalui medium digital juga harus dilakukan.

**Jawaban:**

Betul bahwa bukan hanya bayi yang *stunting*, melainkan binatang juga karena dianggap sesuatu yang melanggar agama. Misalnya, mengapa orang Bali memasak di bawah pohon. Bukan berarti mereka menyembah pohon, tetapi ada sesuatu makna yang mungkin tidak semua orang tahu. Begitu pula di Jawa, mengapa pakai tumpeng? Mengapa saling melempar sirih? Jika terjadi benturan nilai di tingkat sekolah dasar, dicari kembali yang tidak ada benturan nilai dan sederhana. Sementara itu, untuk sekolah menengah atas mungkin sudah bisa dilakukan.



## 5. Upaya Memosisikan Bahasa di dalam Masyarakat Multilingualisme Era Mutakhir Abad Ke-21

### UPAYA MEMOSISIKAN BAHASA DI DALAM MASYARAKAT MULTILINGUALISME ERA MUTAKHIR ABAD KE-21

**Givari Jokowi, Beta Tri Wicaksono, Imam Rosyadi**

Universitas Negeri Malang

givariadv@yahoo.co.id, betatws@yahoo.co.id, Imam.rosyadi01@gmail.com

#### **Abstrak**

Pada era mutakhir ini, masyarakat Indonesia dipaksa untuk menguasai paling sedikit tiga bahasa dalam kesehariannya. *Pertama*, bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas bangsa, *kedua*, bahasa daerah sebagai bahasa kebudayaan bangsa, dan *ketiga*, bahasa asing untuk bersaing di dunia internasional. Hal ini membuat masyarakat Indonesia mengalami sebuah gejala bahasa yang disebut multilingualisme. Penelitian ini berupaya untuk menyeimbangkan bahasa-bahasa yang ada agar tidak mengalami kepunahan atau bergeser akibat dominannya bahasa tertentu dalam pemakaiannya di berbagai segi kehidupan. Upaya *pertama* untuk memosisikan bahasa pada era multilingualisme adalah menekankan kembali hakikat bahasa. Bahasa itu adalah sebuah budaya yang hidup di masyarakat. *Kedua*, pada era multilingualisme, lingkungan membutuhkan pengajar bahasa yang profesional. *Ketiga*, pemerintah menciptakan lingkungan sebagai stimulus pembelajaran bahasa. *Keempat*, peran pemerintah sebagai penguasa tertinggi menjadi harapan agar bahasa dapat tumbuh dan berkembang.

**Kata-kata kunci:** bahasa, multilingualisme, era mutakhir

#### **Abstract**

*At the current era, Indonesian people are forced to master at least three languages in their daily life. First, Indonesian as the language of national identity, both regional languages as the national cultural language, three foreign languages to compete internationally. This makes Indonesian people experience a symptom of language called multilingualism. This research attempts to balance existing languages so that they do not experience extinction or shift due to the predominance of certain languages in their use in various aspects of life. Efforts to position language in an era of multilingualism, first re-emphasize the nature of language that language is a culture that lives in society. Second, in an era of environmental multilingualism requires professional language teachers. Third, government is creating an environment as a stimulus for language learning. The four roles of government as the highest authority become the hope for a language to grow and develop.*

**Keywords:** language, multilingualism, latest era

#### **PENDAHULUAN**

Manusia tidak pernah terlepas dari bahasa. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan keberadaan orang lain dan keberadaan bahasa menjadi alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Bahasa memungkinkan manusia untuk memahami apa yang ada di sekitarnya. Hal itu selaras dengan penjelasan Alwasilah (2011: 7) bahwa manusia itu dianugerahi bahasa, konsep tentang kebahasaan, dan





kemampuan berbahasa. Dengan kemampuannya, manusia mengonsepan alam sekitar yang dinyatakan dalam suatu ujaran. Ujaran tersebut digunakan dalam berbagai lingkungan, tingkatan, dan kepentingan yang beraneka ragam, misalnya komunikasi ilmiah, bisnis, kerja, sosial, dan budaya. Dengan demikian, bahasa akan terus dipergunakan manusia di segala segi kehidupan dalam aneka ragam bahasa di dalam ranah-ranah yang berbeda.

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang terbanyak keempat di dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 memaparkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 248,8 juta jiwa. Di negara yang memiliki banyak suku dan budaya tersebut, setiap suku memiliki identitas bahasa sendiri yang menjadikan negara Indonesia memiliki beragam bahasa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat Indonesia setiap individunya menguasai lebih dari dua bahasa. Gejala ini disebut *bilingualisme* atau bisa jadi *multilingualisme*.

Masyarakat *multilingual* adalah masyarakat yang anggota-anggotanya menguasai lebih dari satu bahasa dalam berkomunikasi antarsesama anggota masyarakat. Konsep *multilingualisme* dapat dijelaskan sebagai gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kemampuan dan kebiasaan memakai lebih dari satu bahasa (Kridalaksana, 2001: 112). Rata-rata masyarakat Indonesia menguasai bahasa daerah di tempat individu pemakai bahasa tinggal, menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara, dan sebagian menguasai bahasa asing karena kebutuhan pada era mutakhir untuk berkomunikasi di dunia internasional dan menghasilkan kualitas kehidupan.

Faktanya, pada era mutakhir ini, masyarakat Indonesia mengalami ketidakseimbangan penguasaan bahasa yang ada dan mengakibatkan kerusakan kaidah bahasa atau pergeseran bahasa itu sendiri hingga terjadi kepunahan suatu bahasa. Menurut Gordon (2005), di Indonesia terdapat 742 bahasa, 737 bahasa di antaranya merupakan bahasa yang masih hidup atau masih digunakan oleh penuturnya. Dua bahasa sebagai bahasa kedua tanpa penutur bahasa ibu dan tiga bahasa lainnya telah punah. Masalah lain adalah bahasa-bahasa yang hidup tadi diperkirakan berada pada posisi kepunahan. Permasalahannya terletak pada berkurangnya jumlah penutur yang menggunakannya dan adanya *subaltern* oleh bahasa yang dominan terhadap bahasa yang tidak dominan.

Selain itu, dengan perkembangan era abad ke-21 dan adanya era Asia Pasifik di masyarakat, khususnya generasi muda, juga dipaksa mampu menguasai bahasa asing untuk bersaing dengan pekerja-pekerja asing yang datang ke Indonesia. Hal itu mengakibatkan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, menjadi bahasa yang terlaris di ekonomi kebahasaan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa tersebut perlu dikendalikan agar tidak ada dominasi satu bahasa saja serta tidak tergesernya bahasa Indonesia dan bahasa daerah oleh maraknya pemakaian bahasa asing. Bahasa Indonesia diharapkan tetap menjadi identitas bangsa di tengah maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik. Demikian juga bahasa daerah sebagai ciri-ciri identitas budaya diharapkan tetap digunakan oleh masyarakat.

Sumarsono (2012: 232) menjelaskan bahwa ketika *guyub tutur* itu memilih bahasa baru di dalam ranah yang semula diperuntukkan bagi bahasa lama, itulah tanda pergeseran sedang berlangsung. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Manaf (2010) dengan judul penelitian “Pengembangan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa Daerah melalui Penstabilan Diglosia”. Penelitian ini membahas permasalahan pemakaian bahasa. Pada masyarakat *bilingual* terjadi



ketidakseimbangan penguasaan bahasa yang mengakibatkan pergeseran suatu bahasa. Sebagai contoh, penggunaan bahasa daerah di perkotaan telah tergeser oleh bahasa Indonesia dan bahasa asing. Oleh karena itu, upaya menstabilkan diglosia melalui disiplin penggunaan bahasa daerah di dalam ranah keluarga merupakan keniscayaan dalam mempertahankan bahasa daerah.

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Tondo (2009) dengan judul “Kepunahan Bahasa-Bahasa Daerah Faktor Penyebab dan Implikasi Etnolinguistik”. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa kepunahan bahasa disebabkan oleh dua masalah, yaitu masalah nonilmiah dan ilmiah. Masalah tersebut digolongkan berdasarkan penyebab yang dapat dihindari dan tidaknya. Penyebab kejadian yang tidak dapat dihindari, seperti bencana alam (*natural disaster*) merupakan masalah alamiah.

Masalah nonilmiah merupakan sebuah permasalahan yang dapat dihindari, antara lain, pengaruh globalisasi, migrasi (*migration*), perkawinan antaretnis (*intermarriage*), dan pengaruh bahasa mayoritas. Penelitian ini juga sedikit menyinggung pengantisipasi fenomena kepunahan bahasa yang berupa upaya untuk tetap menjaga loyalitas komunitas penutur bahasa, upaya pendokumentasian, kajian-kajian dalam berbagai perspektif, dan upaya revitalisasi terhadap bahasa-bahasa yang berada dalam proses kepunahan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulisan makalah dengan judul “Upaya Memosisikan Bahasa di dalam Masyarakat Multilingualisme Era Mutakhir Abad Ke-21” sangat diperlukan. Dalam makalah ini akan dijelaskan upaya-upaya yang tepat untuk menghadapi era mutakhir abad ini guna mempertahankan bahasa Indonesia, terutama sebagai bahasa identitas, mempertahankan bahasa daerah dalam rangka melestarikan bahasa dan budaya daerahnya, serta menguasai bahasa asing guna mempersiapkan generasi muda untuk bersaing di dunia internasional.

## **PENEGASAN KEMBALI HAKIKAT BAHASA**

Bahasa menurut perkembangan awal pada era linguistik Eropa diibaratkan seperti makhluk hidup (Samsuri, 1988). Bahasa diibaratkan seperti makhluk hidup yang disusun oleh sistem-sistem pembentuknya. Berdasarkan hal tersebut, lahirlah teori Strukturalisme Eropa yang dalam pengkajiannya terhadap bahasa diibaratkan seperti orang membunuh bahasa itu dahulu, setelah itu langkah selanjutnya adalah mencincang-cincang dan mengelompokkannya berdasarkan jenis-jenisnya. Pada abad yang sama, berbeda dengan pendapat aliran linguistik Amerika, kebanyakan peneliti Amerika terpengaruh oleh ilmu Antropologi Bahasa yang diibaratkan sebagai sebuah alat manusia. Bahasa adalah alat budaya untuk berkomunikasi antarsesama manusia. Seperti penjelasan Samsuri (1988: 49), bahasa adalah salah satu aspek yang dapat merefleksikan kebudayaan manusia dengan jelas. Oleh karena itu, bahasa dapat menjadi alat untuk mengetahui sebuah kebudayaan dari suatu ras atau komunitas budaya.

Menurut Ratna (2011: 61), bahasa itu berkaitan dengan budaya dan saling memengaruhi karena dengan adanya bahasa dibentuklah sebuah kebudayaan dan peradaban. Akan tetapi, karena adanya pengertian bahwa budaya adalah sebuah aktivitas, bahasa merupakan bagian dari budaya. Hal ini menjadikan bahasa itu sebagai salah satu unsur-unsur dalam budaya. Hal ini hanya dilihat dari segi bahasa sebagai salah satu alat budaya, tetapi sebenarnya konsep bahasa sendiri memiliki pengertian yang sama dengan budaya jika dilihat dari segi lainnya. Goodenough



(1963) memandang budaya secara epistemologi berada dalam alam yang sama dengan bahasa. Bukan berarti bahasa itu di dalam budaya dan bukan pula sebaliknya, budaya di dalam bahasa. Bahasa itu berkembang sebagaimana sebuah budaya berkembang di masyarakat.

Pada umumnya, bahasa hanya diartikan sebagai alat komunikasi, padahal bahasa merupakan sebuah budaya yang hidup di masyarakat. Chaer (2012: 53) menyebutkan bahwa salah satu ciri bahasa adalah dinamis. Bahasa dapat mengalami pergeseran-pergeseran dan akhirnya terjadi kematian bahasa atau kepunahan. Hal itu disebabkan oleh berkurangnya pemakaian bahasa lama akibat dominannya pemakaian bahasa baru. Sejalan dengan itu, Sumarsono (2012: 235--237) menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab bahasa mengalami pergeseran. *Pertama*, masyarakat bilingual menurunkan hanya satu bahasa dan bahasa lain ditinggalkan karena kurangnya pemakaian dalam masyarakat. *Kedua*, terjadi migrasi antarpenduduk yang memiliki bahasa dominan, lalu berpindah ke tempat yang memiliki bahasa penutur yang lebih sedikit atau sebaliknya. *Ketiga*, nilai ekonomi sebuah bahasa (misalnya bahasa Inggris). *Keempat*, lembaga sekolah menjadikan siswa mengalami gejala multilingualisme.

Perkembangan era mutakhir abad ke-21, khususnya di Indonesia dengan masyarakat yang mengalami gejala multilingualisme, menjadi ancaman untuk bahasa-bahasa lokal, terutama bahasa daerah dan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hal tersebut bukan berarti bahwa penggunaan bahasa asing dalam ranah kehidupan dibatasi ataupun dilarang karena takut berdampak pada kepunahan bahasa yang tidak dominan. Namun, sebaiknya ada upaya untuk memosisikan agar bahasa-bahasa itu hidup berdampingan dengan bahasa-bahasa yang lain tanpa merusak atau menindas bahasa yang lebih tinggi nilai ekonominya. Selain itu, bahasa pada era abad ke-21 tidak hanya menjadi alat, tetapi juga menjadi hak dan sumber daya bagi manusia itu sendiri. Hak yang dimaksud adalah bahwa manusia itu memiliki hak untuk menguasai minimal tiga bahasa (bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa asing). Sementara itu, bahasa menjadi sumber daya adalah bahwa bahasa menjadi sebuah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, penegasan kembali hakikat bahasa menjadi hal yang penting guna memberi pengertian kepada khalayak umum minimal di kalangan akademisi. Penegasan hakikat bahasa dapat mengubah pola pikir masyarakat multilingual, terutama menghargai dan menjaga bahasa itu dalam penggunaannya di berbagai ranah kehidupan.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multilingual yang merupakan sebuah gejala bahwa masyarakat menguasai lebih dari satu bahasa. Hal itu dapat mengakibatkan ketidakseimbangan penguasaan bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Bahasa-bahasa itu akan bersaing satu sama lain dan saling memosisikan di masyarakat. Ibrahim dan Soeparno (2008) menyebutkan bahwa gejala bilingualisme terdiri atas bilingualisme setara dan majemuk. Gejala bilingualisme setara adalah masyarakat yang menguasai dua bahasa atau lebih, tetapi secara kaidah pengetahuan bahasa seimbang. Sementara itu, bilingualisme majemuk adalah masyarakat yang menguasai dua bahasa atau lebih, tetapi secara kaidah bahasa hanya satu yang dikuasai sehingga mengakibatkan kekacauan pemakaian bahasa atau interferensi, yaitu masuknya unsur bahasa satu ke bahasa yang lain.

Era mutakhir memaksa masyarakat Indonesia untuk menggunakan lebih dari satu bahasa dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk merealisasikan hal tersebut



dibutuhkan pengajar bahasa yang profesional. Pengajar bahasa di dalam masyarakat multilingual, seperti Indonesia, tidak hanya menguasai bahasa Indonesia untuk mengajar, tetapi juga harus menguasai B1 (bahasa daerah), B2 (bahasa Indonesia sendiri), dan B3 (bahasa asing). Dengan demikian, seorang pengajar bahasa harus menguasai berbagai bahasa tanpa ada kecenderungan di dalam satu bahasa saja. Hal itu sangat penting guna memosisikan bahasa secara sama di hadapan pelajar ataupun masyarakat umum.

Pengajar bahasa profesional juga harus mampu menanamkan sikap bahasa yang positif. Kridalaksana (2001: 197) menjelaskan bahwa sikap bahasa adalah perasaan seseorang terhadap bahasa sendiri ataupun bahasa orang lain. Sikap bahasa, sama halnya dengan sikap pada umumnya, merupakan peristiwa kejiwaan sehingga harus diamati secara langsung. Pengajar bahasa juga harus mengasah keterampilan komunikasi seseorang. Garvin dan Mathiot (1968) merumuskan terdapat tiga ciri-ciri sikap bahasa, yaitu kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran adanya norma. Dalam hal ini, pengajar bahasa profesional berperan untuk menanamkan sikap-sikap tersebut, terutama di masyarakat multilingual.

Sikap kesetiaan bahasa berarti bahwa masyarakat multilingual diharapkan tetap setia terhadap bahasa-bahasa yang digunakan tanpa adanya penggunaan bahasa secara dominan di salah satu bahasa yang dikuasai. Kebanggaan bahasa berarti bahwa masyarakat multilingual diharapkan memiliki rasa bangga terhadap semua bahasa yang dikuasainya tanpa adanya kecenderungan satu bahasa saja yang dibanggakan. Sementara itu, tentang kesadaran adanya norma, pengajar bahasa profesional dapat mendorong masyarakat multilingual untuk menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun dalam berbagai ranah kehidupan.

Seorang pengajar bahasa juga harus mengajarkan bahasa-bahasa tersebut bukan hanya sebagai sebuah ilmu, melainkan juga sebagai keterampilan berbahasa. Menurut Catab (2007: 29), keterampilan komunikasi merupakan kemampuan mengadakan hubungan lewat saluran komunikasi manusia atau media sehingga pesan atau informasinya dapat dipahami dengan baik. Keterampilan komunikasi yang sangat dibutuhkan untuk era multilingualisme mencakup dua hal, yaitu keterampilan komunikasi lisan dan tulisan. Keterampilan komunikasi lisan mencakup berbicara di depan publik, pidato formal, dan kemampuan berbicara sesama dengan cara baik dan benar. Keterampilan komunikasi tulis mencakup kemampuan seseorang untuk membuat beragam tulisan, terutama tulisan-tulisan yang berbentuk formal, seperti surat-menyurat, laporan, dan proposal. Oleh karena itu, seorang pengajar pada masyarakat multilingual tidak hanya mengajarkan dalam satu Bahasa, tetapi juga harus menguasai berbagai keterampilan bahasa.

Dengan kemampuan profesionalnya, pengajar dapat menjawab tantangan pengajaran untuk masyarakat multilingual seperti di Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga menjadi sebuah pembelajaran tanpa memandang kecenderungan terhadap suatu budaya atau kultur bahasa. Namun, sebagai pengajar atau pembelajar bahasa, kita harus netral atau bersikap adil dan saling menerima tanpa adanya rasa dogmatis dalam penggunaan bahasa di ranah kehidupan sehari-hari.

## **MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI STIMULUS PEMBELAJARAN BAHASA**

Bahasa tidak semata-mata diperoleh tanpa adanya sebuah stimulus. Menurut pendapat Skinner dalam Dardjowidjojo (2012: 235), bahasa merupakan sebuah



kebiasaan, yang di dalamnya termasuk sebuah pengetahuan yang didasarkan adanya sebuah stimulus respons. Pemerolehan bahasa diawali dengan kemampuan mendengar, kemudian meniru suara yang didengar. Hal itu perlu karena anak pada umumnya meniru ujaran yang didengarnya. Sebagaimana dipertegas oleh Sumaryanti (2017) bahwa lingkungan sangat mendukung perkembangan bahasa anak.

Bahasa seseorang dapat berkembang bukan karena perkembangan bahasa itu sendiri tanpa pengaruh yang lain. Bahasa itu akan berkembang dan membutuhkan stimulus yang nantinya mengakibatkan seseorang berbahasa dengan apa yang dia dengar atau distimuluskan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah lingkungan bahasa untuk mendukung berkembangnya bahasa seseorang. Purba (2013) menjelaskan bahwa lingkungan bahasa adalah situasi suatu wilayah tertentu, terdapat suatu bahasa tumbuh, berkembang, dan digunakan oleh penuturnya. Lingkungan itu mencakup segala hal yang dapat didengar, dilihat, dan memengaruhi proses komunikasi seseorang.

Lingkungan bahasa akan mempunyai peran besar dalam pembelajaran bahasa. Bahasa bukan sebuah ilmu yang harus dihafal ataupun ilmu yang harus dihitung secara ilmiah. Belajar bahasa itu membutuhkan pembiasaan. Prinsip pendidikan berbahasa seperti halnya prinsip pendidikan karakter, seperti yang dijelaskan oleh Sahlan dan Teguh (2012, 184—85) bahwa pendidikan karakter itu harus menggunakan prinsip 3C, *commitment*, *competence*, dan *consistency*. *Pertama* adalah komitmen serius untuk mengembangkan pendidikan karakter. *Kedua* adalah mewujudkannya sebagai gerakan sosial. *Ketiga* adalah saat melakukan pelaksanaan pendidikan karakter secara konsisten atau kontinu. Sama halnya dengan belajar bahasa, lingkungan pun harus didukung oleh setiap individu agar terwujud lingkungan bahasa yang maksimal.

Krashen (1981) mengemukakan bahwa lingkungan bahasa itu terdiri atas dua jenis, yaitu lingkungan formal dan lingkungan informal. Lingkungan formal adalah lingkungan yang dibentuk melalui sebuah perencanaan. Sebagai contoh, guru mengajar siswa di dalam kelas, salah satu pembelajaran atau lingkungan yang direncanakan untuk mengarahkan siswanya menguasai kaidah bahasa. Sementara itu, lingkungan informal adalah lingkungan tanpa adanya sebuah perencanaan atau secara alami. Lingkungan informal meliputi komunikasi antarkeluarga dalam rumah, komunikasi di dalam pasar, kantor, atau di mana saja. Menciptakan lingkungan tersebut akan membiasakan manusia yang hidup di dalamnya menggunakan bahasa apa yang ada di lingkungan tersebut.

Pembiasaan bahasa dapat kita saksikan di beberapa tempat yang memanfaatkan hal itu untuk pembelajar bahasa. Seperti di daerah Pare, Kota Kediri terdapat sebuah kampung yang terkenal dengan nama Kampung Inggris. Kampung tersebut sekarang menjadi tempat kursus untuk pembelajaran bahasa Inggris. Pare memiliki sebuah lingkungan yang sangat mendukung, yaitu lingkungan yang semua masyarakatnya menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris untuk berkomunikasi setiap harinya. Hal itu menjadi sebuah stimulus untuk penguasaan bahasa seseorang, terutama bahasa asing (Inggris).

Kasus lain terdapat pada lembaga Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Di lembaga tersebut, para santri diwajibkan untuk menaati strategi belajar bahasa, yaitu Minggu Bahasa. Kegiatan ini berupa pergantian penggunaan bahasa setiap dua minggu sekali. Santri wajib menggunakan bahasa



yang telah terjadwal, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Hal itu menjadi pembiasaan terhadap penggunaan bahasa setiap hari saat beraktivitas. Hasilnya santri yang lulus dari pondok Pesantren Gontor menguasai bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris.

Di dalam masyarakat multilingual, masyarakat diharapkan dapat menguasai bahasa yang dibutuhkan pada era mutakhir ini, terutama penguasaannya terhadap bahasa asing tanpa meninggalkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Penciptaan lingkungan bahasa sebagai stimulus merupakan salah satu upaya menguatkan penguasaan bahasa setiap individunya. Lingkungan bahasa tersebut nantinya tidak hanya mendominasi satu bahasa, tetapi juga menyeimbangkan pemakaian bahasa. Pembiasaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa seseorang tanpa didominasi satu bahasa saja.

### **PERAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGUASA TERTINGGI**

Peran pemerintah menjadi kunci perkembangan bahasa dalam satu negara. Pemerintah sebagai penguasa memiliki wewenang mengatur bahasa-bahasa tersebut agar saling berdampingan satu sama lain di dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam hal ini adalah membuat kebijakan berupa perundang-undangan, infrastruktur, dan sistem pengembangan bahasa.

Peran pemerintah dalam menyusun sebuah kebijakan perundang-undangan Bahasa bertujuan agar bahasa itu tetap berjalan sesuai harapan. Agustina (2010: 177) menjelaskan bahwa kebijakan bahasa merupakan satu pegangan yang bersifat nasional untuk membuat perencanaan, pembinaan, dan pengembangan bahasa sebagai alat komunikasi. Kebijakan tentang perencanaan, pembinaan, dan pengembangan bahasa diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009, Bab III Pasal 41, yang berisi tentang kewajiban pemerintah untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa.

Menurut Forgusen dalam Musclih dan Oka (2010: 1--2), ada tiga alasan perlunya perencanaan bahasa. *Pertama*, bahasa itu bersifat dinamis yang menyebabkan bahasa itu terus berkembang mengikuti perkembangan penuturnya. *Kedua*, kemampuan kaidah setiap orang berbeda-beda. Oleh sebab itu, bahasa yang baik dan benar bergantung pada pengetahuan setiap orang. *Ketiga*, perubahan yang disebabkan oleh jajahan negara lain mengalami perubahan pemakaian bahasa.

Selain kebijakan tersebut, ada satu kebijakan penting lainnya yang menjadi peranan pendidikan di negara Indonesia, yaitu kebijakan tentang pemakaian tiga bahasa dalam ranah pendidikan. Secara yuridis, penggunaan ketiga bahasa tersebut diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Bab VII Pasal 33 yang menyatakan bahwa (1) sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, (2) bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu, dan (3) bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan-kebijakan inilah yang digunakan dan ditaati oleh khalayak umum untuk penggunaan dan pemakaian bahasa. Harapannya adalah adanya keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap penggunaan bahasa.

Selain memberi kebijakan perundang-undangan, pemerintah juga memiliki



peran dalam membuat kebijakan infrastruktur. Misalnya, mahasiswa atau pelajar punya infrastruktur yang memudahkan pengunggahan tulisannya dan mendapat tanggapan oleh banyak pihak. Selain itu, pembuatan sebuah kelas atau laboratorium bahasa untuk berlatih berbicara, seperti berlatih berpidato atau berdebat di ranah sekolah-sekolah. Hal-hal seperti ini sangat mendukung perkembangan bahasa seseorang dan memperkuat kemampuan berbahasa seseorang. Terakhir, selain membuat kebijakan tentang infrastruktur, pemerintah juga membuat kebijakan sistem untuk mendukung hal itu, yaitu sistem-sistem yang mendukung adanya pembelajaran bahasa. Contohnya adalah membuat sebuah agenda di setiap sekolah untuk mengasah kemampuan berbahasa, berupa praktik pidato, berdebat, dan penyelenggaraan festival untuk memperagakan itu.

## **PENUTUP**

Upaya memosisikan bahasa di dalam masyarakat multilingualisme yang merupakan salah satu cara untuk menyiapkan masyarakat untuk era ini tidak seharusnya dilakukan dengan menciptakan kebijakan pelarangan penggunaan bahasa atau membatasi penggunaan bahasa karena takut berdampak pergeseran bahasa oleh bahasa yang dominan. Namun, hal yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan masyarakat yang mampu menjadi penentu untuk penstabilan penggunaan bahasa di berbagai ranah kehidupan tanpa adanya kecenderungan hanya menguasai satu bahasa. Bahasa-bahasa itu, di antaranya, adalah penguasaan bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas bangsa, bahasa daerah sebagai ciri kultur budaya, dan bahasa asing untuk menghadapi era mutakhir di ranah internasional. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh upaya sebagai berikut.

*Pertama*, penegasan kembali hakikat bahasa. Hakikat bahasa itu di dalam masyarakat hanya merupakan sebuah alat komunikasi. Padahal, bahasa itu adalah sebuah budaya yang tumbuh di dalam masyarakat yang mengalami perkembangan dan pergeseran hingga kepunahan. Hal itu dipertegas kembali agar masyarakat sadar betapa berpengaruhnya kehidupan bahasa tersebut dengan mereka sebagai pemilik bahasa.

*Kedua*, masyarakat multilingual membutuhkan pengajar bahasa yang profesional, yaitu pengajar yang mampu menguasai tiga bahasa, yakni bahasa daerah, bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas negara, dan bahasa asing. Pengajar harus mampu mendorong masyarakat untuk memiliki sikap bahasa yang positif, yaitu kesetiaan berbahasa, kesadaran berbahasa, dan kesadaran adanya norma bahasa. Tiga sikap itu harus dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat multilingual. Pengajar bahasa harus mampu mengasah keterampilan berkomunikasi lisan, seperti berpidato, berdebat, ataupun keterampilan komunikasi tulis yang berupa surat-menyurat, laporan, dan sebagainya.

*Ketiga*, menciptakan sebuah lingkungan yang menjadi stimulus bagi pembelajar bahasa. Pembelajaran bahasa perlu pembiasaan sehingga dibutuhkan lingkungan yang menjadi stimulus untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Harapannya adalah hal tersebut dapat muncul tidak hanya di Kampung Inggris dan Pondok Pesantren Gontor, tetapi juga di kalangan akademis, seperti sekolah dan kampus dan lembaga lainnya. Terakhir adalah peranan pemerintah sebagai penguasa tertinggi yang menjadi penentu perkembangan bahasa. Peran pemerintah dapat diwujudkan melalui penerbitan kebijakan-kebijakan melalui perundang-undangan, kebijakan infrastruktur, dan kebijakan sistem guna mendukung



perkembangan bahasa tanpa kecenderungan dalam satu bahasa saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar. (2011). *Linguistik suatu Pengantar*. Bandung: Percetakan Angkasa.
- Amalia, Mustika Nur. (2017). Era Budaya: Perencanaan Pengajaran Bahasa Memasuki Era Abad Ke-21. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, (Online), 1 (1): 21-28, ([https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixu3iyqTbAhXGV30KHSRyABQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Friset.unisma.ac.id%2Findex.php%2Fkip%2Farticle%2Fdownload%2F221%2F280&usg=AOvVaw3ug4gQtc\\_xvC9SvjXt7\\_RXT](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixu3iyqTbAhXGV30KHSRyABQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Friset.unisma.ac.id%2Findex.php%2Fkip%2Farticle%2Fdownload%2F221%2F280&usg=AOvVaw3ug4gQtc_xvC9SvjXt7_RXT)), diakses tanggal 27 Mei 2018.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Data Kependudukan*. Jakarta (ID): BPS.
- Brown, D. Douglas. (2008). *Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa*. Jakarta: Kedutaan Besar Amerika.
- Chaer, Abdul. (2012). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul & Agustina, Leonie. (2010). *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chatab, Nevizond. (2007). *Profil Budaya Organisasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Dardjowidjojo, Soenjono. (2012). *Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Garvin, P.L. & Mathiot, M. (1968). *The Urbanization of Guarani Language. Problem in Language and Culture*, Dalam Fishman, J.A (Ed) *Reading in Tes Sociology of Language*. Mountain. Paris: The Hague.
- Gordon, Raymond G. (2005). *Ethnologue: Language of The World*. Dallas, Tex: SIL Internasional.
- Goodenough, W.H. (1963). *Cooperation in Changes*. New York: Russell Sage.
- Found, Ibrahim, Syukur, & Soeparno. (2008). *Sosiolinguistik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kridalaksana, Harimurti. (2001). *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Krashen, S.D. (1981). *Second Language Acquisition And Second Language Learning*. Oxford: Pergamon Press.
- Manaf, Ngusman Abdul. (2010). Pengembangan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa Daerah melalui Penstabilan Diglosia. <http://eprints.undip.ac.id/36907/1/16.pdf>. (Online) diakses pada tanggal 27 Mei 2018.
- Muschlih, Masnur, & I Gusti Ngurah Oka. (2010). *Perencanaan Bahasa di Era Globalisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purba, Andiopenta. (2013). Peranan Lingkungan Bahasa dalam Pemerolehan Bahasa Kedua. *Pena*, (online) 3(1): 13—25, (<https://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/pena/article/view/1447/941>), diakses tanggal 27 Mei 2018.
- Ratna, Nyoman Kutha. (2011). *Antropologi Sastra: Peranan Unsur-Unsur Kebudayaan dalam Proses Kreatif*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Sahlan, Ashmaun dan Teguh Angga Prasetyo. (2012). *Desain Pembelajaran*





- Berbasis Pendidikan Karakter*. Surabaya: Ar-Ruzz.
- Samsuri. (1988). *Berbagai Aliran Linguistik Abad XX*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sumarsono. (2012). *Sosiolinguistik* (edisi VII). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumaryanti, Lilis. (2017). Peranan Lingkungan terhadap Perkembangan Bahasa Anak. *Muaddib*, (online) 7(1): 72--89,  
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/download/552/475>, diakses tanggal 27 Mei 2018.
- Tondo, Fanny Hanry. (2009). Kepunahan Bahasa-Bahasa Daerah Faktor Penyebab dan Implikasi Etnolinguistik.  
<http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/download/245/223>. (Online) diakses pada tanggal 27 Mei 2018.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Komisi Informasi.(Online),<https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/101>), diakses 28 Mei 2018.
- Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahasa Kemendikbud (Online),  
[http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/UU\\_2009\\_24.pdf](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/UU_2009_24.pdf), diakses 28 Mei 2018.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Givari Jokowi  
Judul Makalah: “Upaya Memosisikan Bahasa di dalam Masyarakat Multilingualisme Era Mutakhir Abad Ke-21”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 13.45—15.15  
Moderator : Drs. Muhammad Muis, M.Hum.  
Pencatat : 1. Dewi Khairiah  
2. Nadia Almira Sagita

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pemersatu karena *lingua franca*, persebarannya yang sudah luas, bukan milik golongan, dan kekerabatan dengan bahasa lain tidak jauh berbeda.
2. Masyarakat multilingualisme
3. Masyarakat Indonesia sebaiknya menguasai tiga bahasa, yakni bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing.
4. Bentuk upaya untuk memosisikan bahasa dalam masyarakat yang disarankan adalah
  - a. menegaskan kembali hakikat bahasa kepada masyarakat,
  - b. pengajaran bahasa yang profesional,
  - c. menciptakan lingkungan sebagai stimulus pembelajaran bahasa, misalnya menerapkan peraturan untuk hari-hari tertentu berbahasa yang baik, seperti Kampung Inggris, dan
  - d. peran pemerintah, misalnya membuat laboratorium bahasa dan agenda-agenda kebahasaan.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Syahrudin  
Instansi : Makassar

**Pertanyaan:**

Bagaimana peran pemerintah memberikan kebijakan politik bahasa dalam melihat perkembangan globalisasi dewasa ini yang tidak bisa dibendung lagi dari bahasa asing?

**Jawaban:**

Pemerintah memberikan peran mereka dengan menciptakan kebijakan yang dapat memastikan ketiga bahasa saling berdampingan



**6. Kebijakan dan Perlindungan terhadap Bahasa Daerah: Perspektif Kewenangan Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus**  
**KEBIJAKAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP BAHASA DAERAH: PERSPEKTIF KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS**

**Hugo Warami**  
Universitas Papua  
h.warami@unipa.ac.id

**Abstrak**

Kebijakan merupakan masalah yang bersifat kontinuitas dan berdampak multiaspek sehingga isunya selalu berada dalam struktur masalah yang memerlukan identifikasi dan klasifikasi agar diperoleh fokus permasalahan. Berdasarkan fakta saat ini, fenomena kebijakan yang tertuang dalam dokumen negara mengandung sejumlah kewenangan pada sistem pemerintahan Republik Indonesia yang sarat dengan nuansa legitimasi kekuasaan dan kewenangan pemerintah. Kebijakan di Indonesia saat ini tergambar melalui pemberian dua kewenangan, yakni otonomi daerah dan otonomi khusus. Dalam tulisan ini akan dibahas beberapa aspek yang berhubungan dengan kebijakan dan perlindungan bahasa di Indonesia. Selain itu, dalam tulisan ini juga mengungkap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang merupakan keputusan politik serta mengandung kebijakan dan perlindungan yang sarat akan nuansa kewenangan dalam keberagaman bahasa. Kajian ini dieksplorasi dengan perspektif analisis deskriptif yang mengacu pada fenomena kebijakan yang dilegitimasi melalui produk hukum. Objek dalam tulisan ini terdiri atas dua, yakni (1) kebijakan otonomi daerah dan (2) kebijakan otonomi khusus beserta kebijakan turunannya. Analisis kebijakan dalam perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dipotret dari tiga perspektif, yaitu (1) perspektif empirik, (2) perspektif evaluatif, dan (3) perspektif normatif. Kebijakan dan perlindungan bahasa dianalisis dengan tidak saja menghasilkan informasi, tetapi juga mengungkap argumen yang berorientasi pada kebijakan. Argumentasi yang terungkap dari kebijakan bahasa menjadi ciri utama mengapa setiap etnis penutur bahasa daerah mempertanyakan kewenangan-kewenangan yang telah dibuat melalui produk hukum. Keberadaan bahasa daerah diharapkan menjadi dasar pembentukan identitas suku bangsa, peneguhan cermin jati diri kedaerahan, serta media pengungkap corak sastra dan budaya nusantara. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kebijakan dan kewenangan yang dijadikan dasar perlindungan bahasa serta menawarkan solusi dalam rangka menyinergikan keluaran (*output*)/produk/hasil implementasi kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bentuk produk hukum perundang-undangan agar dapat selaras dengan arah pembangunan nasional serta untuk memeriksa semata-mata rumusan norma hukum perundang-undangan.

**Kata-kata kunci:** *kebijakan, perlindungan, bahasa daerah*

**Abstract**

*The policy problem is a problem that is continuous and has a multi-faceted impact so that it is always a policy issue whose issue is in the structure of the problem that requires identification and classification in order to obtain the focus of the problem.*



*The current fact is that the policy phenomena contained in state documents contain a number of authorities in the Government system of the Republic of Indonesia which are full of nuances of the legitimacy of government power and authority. Current policies in Indonesia are illustrated through the granting of two authorities, namely Regional Autonomy and Special Autonomy. In this paper, several aspects related to language policy and protection in Indonesia will be discussed. In addition, this article also reveals Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua which is a political decision and contains policies and protections that are full of nuances of authority in language diversity. This study was explored with the perspective of descriptive analysis which refers to the phenomenon of policies that are legitimized through legal products. The object in this paper consists of two, namely (1) Regional Autonomy policy, and (2) Special Autonomy policy along with its derivative policies. Policy analysis in the protection, coaching, and development of languages is portrayed in three perspectives, namely (1) empirical perspective, (2) evaluative perspective, and (3) normative perspective. Language policies and protections are analyzed not only by producing information but also by expressing policy-oriented arguments. The arguments revealed from language policy are the main characteristics of why every ethnic native language speaker questions the authority that has been made through legal products. The existence of regional languages is expected to be the basis for the formation of ethnic identity, the affirmation of the mirror of regional identity, and the media revealing the literary and cultural patterns of the archipelago. This study aims to illustrate the policy and authority conditions that serve as the basis for language protection and offer solutions in order to synergize the output / product / results of the implementation of government policies (central and regional) in the form of legislation products in order to be aligned with the national development direction as well as to examine solely formulation of legal norms of law.*

**Keywords:** *policy, protection, regional languages*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan Indonesia dalam rumah Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu arah pembangunan Indonesia. Hal itu dapat dilakukan melalui percepatan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya dengan prinsip keberpihakan menuju demokrasi lokal yang beradab. Selain itu, pemerataan, keadilan, dan keberagaman sosial budaya di Nusantara juga menjadi modal dasar dalam membangun wajah keindonesiaan. Hal itu selaras dengan makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda tetapi satu, persatuan dari keragaman yang ada. Keragaman itulah yang mendorong bangsa Indonesia ke panggung internasional sebagai bangsa dengan sumber daya keragaman terbesar di dunia.

Pernyataan di atas mengungkap bahwa sebagai sebuah bangsa yang besar dengan jumlah adat dan budaya serta sejarah yang panjang, Indonesia memiliki kekayaan bahasa yang sangat banyak. Kutipan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur pada 8 Januari 2018 berbunyi, “Saya tahu betul, saya kira saudara-saudara semuanya juga tahu bahwa kita memiliki 714 suku, memiliki lebih dari 1.100 bahasa daerah yang berbeda-beda, yang tinggal di 17.000 (17.508) pulau yang kita miliki.” Pernyataan ini menggambarkan bahwa presiden tengah memperlihatkan Bhinneka Tunggal Ika



yang dapat dipotret dari berbagai sudut pandang, termasuk bahasa (Hardyanto, 2018).

Selain itu, dalam dialog dengan 28 budayawan di Galeri Nasional, Jakarta, Presiden Joko Widodo menyatakan, “Tidak ada daerah yang dilupakan, tidak ada daerah yang dikesampingkan, tidak ada daerah yang dianaktirikan dan dianakemaskan. Semuanya adalah anak kandung ibu pertiwi. Harapan itu menumbuhkan kembali kesusastraan, menguatkan kembali diplomasi budaya, serta membangun pusat-pusat kebudayaan yang tidak hanya di wilayah urban saja, tetapi juga di desa.” Harapan tersebut kemudian akan muncul kebijakan makro kebudayaan dalam proses pembudayaan manusia yang diperlukan untuk menyeimbangkan hidup (*Beritagar*, 2016).

Dalam semangat membangun rumah keindonesiaan, diperlukan sebuah sinergitas dan koneksitas yang oleh Presiden Joko Widodo disebut sebagai “Indonesia Sentris”. Menurut Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid dalam *PresidenRI.go.id* (2016), kebijakan pembangunan “Indonesia Sentris” dari Presiden Joko Widodo dalam platform kebudayaan, mencakup (1) upaya membangun koneksitas di antara seluruh suku bangsa, yakni koneksitas tentang keutuhan identitas bangsa Indonesia; (2) keindonesiaan yang selama ini masih terfragmentasi karena berbagai kendala, baik itu kendala politik, budaya, ekonomi, maupun infrastruktur; (3) gagasan tentang “Indonesia Sentris” merupakan bagian dari butir-butir Nawacita; dan (4) terbukanya ruang-ruang baru bagi proses perubahan. Platform di atas merupakan perspektif dari sebuah strategi kebudayaan yang diharapkan dapat membangun kembali semangat nasionalisme pada era kekinian. Hal itu menjadi bagian yang penting untuk dilakukan dalam upaya menyatukan dan memperkuat identitas bangsa sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.

Koneksitas wilayah merupakan bukti dalam pembangunan Nusantara melalui hadirnya kebijakan desentralisasi. Namun, jauh sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1945 telah tertuang masalah pemerintahan daerah, yang di dalamnya telah mengandung prinsip desentralisasi dan otonomi daerah walaupun kehadirannya hanya memberi ruang dalam pembentukan daerah setingkat provinsi. Seiring perjalanan waktu, prinsip desentralisasi dan otonomi daerah selalu ada dengan sebutan yang baru setiap periode. Namun, implementasi dan otonomi daerah tersebut masih didominasi oleh nuansa sentralisasi. Ketika otonomi daerah mulai diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, banyak kalangan yang menganggap bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah terkesan simetris. Hal itu tecermin dalam kebijakan otonomi daerah dan otonomi khusus di Indonesia sebagai wujud kebijakan pemerintah pusat yang membuat sejumlah daerah otonom mengalami dan merasakan adanya dualisme kewenangan. Hal tersebut berujung pada ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pembinaan terhadap bahasa dan sastra di Nusantara.

Sejak tahun 2000-an, kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa daerah di Nusantara menjadi perhatian yang serius. Wujud nyata dari perhatian itu melahirkan berbagai produk hukum sebagai dasar kewenangan pemerintah yang memprioritaskan pendokumentasian bahasa-bahasa daerah yang kian kritis di ambang kepunahan serta menurunnya jumlah pewaris.

Fakta saat ini menunjukkan bahwa berbagai regulasi kebijakan yang berbentuk produk hukum untuk mengatur kewenangan-kewenangan, baik kewenangan di



pusat maupun di daerah, dalam lembaga pengembangan dan perlindungan bahasa, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) masih terkesan berjuang sendiri-sendiri serta belum bersinergi. Misalnya, dalam undang-undang pemerintah daerah terungkap bahwa seluruh bidang pemerintahan menjadi kewenangan daerah, sedangkan kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan-keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta bidang lainnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jika kewenangan daerah yang dimaksudkan dalam undang-undang pemerintah daerah dikaitkan dengan kebijakan politik bahasa nasional, kewenangan daerah dalam merawat dan merevitalisasi daya hidup bahasa-bahasa Nusantara menjadi tersandera oleh ketumpangtindihan tanggung jawab. Kondisi itu merupakan salah satu wujud konsekuensi logis atas pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak daerah, termasuk di dalamnya bahasa dan budaya lokal. Sebagai wakil pemerintah yang menangani masalah kebijakan politik bahasa nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki arah kewenangan yang difokuskan pada program penelitian, pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra. Lapoliwa (2011: 202) menyatakan bahwa politik bahasa nasional pada dasarnya dilandasi oleh visi (pemerintah) mengenai bahasa yang ada di dalam negeri, dalam hal ini bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Politik bahasa nasional diarahkan pada upaya perwujudan visi kebahasaan dan kesastraan.

Tulisan ini pada dasarnya bertujuan untuk menawarkan solusi dalam rangka menyinergikan *output* ‘produk/hasil’ implementasi kebijakan dan kewenangan dalam perlindungan serta pembinaan terhadap bahasa oleh pemerintah pusat dan daerah melalui prinsip otonomi daerah dan otonomi khusus sebagai wujud produk hukum perundang-undangan agar dapat selaras dan tidak tumpang-tindih. Selain itu, agar setiap pemangku kebijakan (pusat dan daerah) dapat melakukan tugas, pokok, dan fungsinya secara maksimal.

Dalam perspektif nasional, perlindungan bahasa dari ancaman kepunahan belum dipayungi dengan produk hukum yang kuat di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) secara menyeluruh sesuai dengan asas otonomi daerah dan otonomi khusus. Kebijakan dan kewenangan dalam perlindungan serta pembinaan bahasa di Indonesia masih belum tertata secara baik. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas pokok dan fungsi tanggung jawab dalam perlindungan dan pengembangan bahasa yang masih belum bersinergi. Sementara itu, dalam kondisi yang sedang tumpang-tindih kebijakan dan kewenangan terhadap pengelolaan bahasa, pemerintah sedang menyusun rancangan undang-undang (RUU) tentang bahasa daerah. Rancangan peraturan tersebut tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015—2019 dengan nomor registrasi 128 bernama Rancangan Undang-Undang Bahasa Kesenian Daerah. Untuk itu, sebagai urgensi nasional dan menyongsong Tahun Internasional Bahasa Daerah 2019 diharapkan menjadi momentum lahirnya undang-undang tentang bahasa daerah. Sementara itu, implementasi Otonomi Khusus Papua selama hampir 17 tahun belum menunjukkan kinerja pemerintah pusat dan daerah secara maksimal. Hal ini menyimpang dari amanat undang-undang dan belum menunjukkan komitmen yang kuat untuk secara konsisten melaksanakan amanat undang-undang otonomi khusus Papua secara adil, jujur, dan bermartabat.



## TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini disajikan beberapa tinjauan empiris produk hukum kebijakan yang telah diundangkan dan berkaitan dengan kebijakan bahasa di Indonesia. *Pertama*, konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda atau *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* melalui Perpres RI Nomor 78 Tahun 2007. *Kedua*, pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan daerah (pelestarian bahasa dalam upaya untuk memelihara sistem kebahasaan yang digunakan oleh komunitas atau kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat) melalui Permendagri Nomor 40 Tahun 2007. *Ketiga*, pengesahan konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya atau *Convention on The Protection and Promotion of The Diversity of Cultural Expressions* melalui Perpres RI Nomor 78 Tahun 2011. *Keempat*, UU RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Penguatan bahasa melalui undang-undang ini merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, serta kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kelima*, Otonomi Khusus Papua (Bab XVI tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 58 tentang kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa/sastra daerah guna mempertahankan serta memantapkan jati diri orang Papua) melalui UU RI Nomor 21 Tahun 2001. *Keenam*, Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2014. Peraturan tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut, (1) upaya memodernkan bahasa melalui pemerikayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional (pengembangan bahasa); (2) upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat (pembinaan bahasa); dan (3) upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran (pelindungan bahasa). *Ketujuh*, Pelindungan dan pembinaan kebudayaan asli Papua yang mendorong pemerintah daerah untuk melindungi, (a) bahasa dan sastra, (b) sistem peralatan hidup dan teknologi, (c) sistem mata pencaharian, (d) organisasi sosial dan sistem kekerabatan, (e) sistem pengetahuan, (f) kesenian, dan (g) kepercayaan melalui Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2008.

## LANDASAN TEORI

### Perencanaan Bahasa

Kasno dan Anzali (2015: 40) menyebutkan bahwa perencanaan bahasa yang disebutkan Haugen (1966) merupakan evaluasi dari perubahan bahasa. Perencanaan itu tidak semata-mata meramalkan masa depan berdasarkan apa yang diketahui masa lampau, tetapi perencanaan tersebut juga merupakan usaha yang terarah untuk memengaruhi masa depan suatu bahasa. Selain itu, Kasno dan Anzali (2015: 40—41) juga menyebutkan bahwa perencanaan bahasa yang disebutkan Wardough (2006) merupakan kewenangan pemerintah, berjangka panjang,



berkesinambungan, dan upaya sadar untuk mengubah fungsi bahasa di dalam masyarakat agar dapat memecahkan masalah dalam komunikasi.

Atas dasar pandangan tersebut, perencanaan bahasa merupakan sebuah proses dalam melihat penggunaan bahasa. Proses perencanaan bahasa tersebut mencakup (a) perencanaan status (*language policy planning, language status planning*) atau (*language for language planning*), (b) perencanaan korpus (*language corpus planning*) atau (*language development*), (c) pelaksanaannya (*implementation*), dan (d) penilaian (evaluasi). Selain itu, sebagai ranah ilmu sosiolinguistik, perencanaan bahasa juga termasuk dalam kelompok sosiolinguistik terapan yang terdiri atas empat bidang kajian, yaitu (1) perumusan politik bahasa dalam suatu masyarakat atau negara tertentu, (2) pelaksanaan politik bahasa di suatu masyarakat atau negara tertentu, (3) perencanaan suatu bahasa agar pembinaan dan perkembangannya dapat diarahkan dan diawasi untuk menuju suatu tingkat tertentu sesuai dengan harapannya, dan (4) penerapan pendidikan bahasa di suatu masyarakat, terutama masyarakat dwibahasa atau aneka bahasa (bilingual atau multilingual).

### **Teori Kebijakan**

Bagian ini akan mengulas teori kebijakan yang dapat dijadikan landasan analisis data dalam kajian ini. Kebijakan negara dalam pandangan Wahab (2008: 6—7) terbagi menjadi empat bagian, yakni (1) kebijakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku yang direncanakan; (2) kebijakan negara terdiri atas tindakan yang orientasinya saling berkaitan dan memiliki formula yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri; (3) kebijakan negara merujuk pada apa urgensi yang dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu; dan (4) kebijakan negara berdampak positif, yakni kebijakan negara dalam bentuk tindakan pemerintah dalam memengaruhi masalah tertentu, sedangkan dampak negatif, yakni keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam masalah-masalah yang campur tangan pemerintah diperlukan.

### **Teori Kewenangan**

Bawole dan Warami (2016) menyebutkan bahwa ada tiga kriteria yang dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat kongruen tersebut secara proporsional antarpemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) dalam pembagian urusan pemerintahan yang meliputi (1) eksternalitas, (2) akuntabilitas, dan (3) efisiensi. Ketiga kriteria tersebut secara kumulatif dijadikan sebagai satu-kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antartingkatan dan susunan pemerintahan dengan empat kriteria. *Pertama*, eksternalitas, yaitu kriteria yang memiliki asumsi bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. *Kedua*, akuntabilitas, yaitu kriteria yang menjadi dasar pencegahan terjadinya tumpang-tindih pengakuan atas dampak kewenangan tersebut, yakni tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebutlah yang paling berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. *Ketiga*, efisiensi, yaitu kriteria yang memiliki asumsi dasar bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis dengan mengedepankan





prinsip efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk menghadapi persaingan pada era global.

## **PEMBAHASAN**

### **Kewenangan Konteks Pusat**

#### **1. Kewenangan dalam Amendemen UUD 1945**

Dalam rangka mendukung kebijakan bahasa di Indonesia, salah satu ancaman yang dilakukan adalah merevitalisasi pola tatanan kehidupan dan kearifan budaya lokal setiap kelompok etnis agar perangkat nilai dan kearifan lokal tersebut dapat hidup dan berkembang lagi sesuai dengan substansi yang sebenarnya dalam realitas kehidupannya sehari-hari. Upaya tersebut merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 281, Ayat (3) pascaperubahan yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Sejalan dengan itu, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan dan hukum juga mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (1) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa”.

Kridalaksana (2011) menyatakan bahwa kebijakan politik bahasa oleh pemerintah pusat diwacanakan sebagai konsensus nasional yang bertujuan untuk (1) mengekalkan dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa, (2) mempertegas fungsinya dalam kehidupan berbangsa, (3) memuliakan bahasa-bahasa daerah sebagai kekayaan sosial budaya bangsa, (4) senantiasa mengorientasikan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan konstelasi dunia, khususnya dengan mempertegas fungsi bahasa-bahasa asing, dan (5) memanfaatkan perkembangan bahasa-bahasa di dunia dengan karya sastra dan karya intelektualnya demi kemajuan peradaban Indonesia. Selain itu, Alwi (2011: 13) juga mengemukakan bahwa politik bahasa harus mencakup sejumlah aspek yang memungkinkan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan serta wahana aspirasi bangsa ke arah pendemokrasian masyarakat dengan ciri sebagai bahasa demokratis, yang tidak mencerminkan status stratifikasi sosial pemakaiannya.

#### **2. Kewenangan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999, Nomor 32 Tahun 2004, dan Nomor 32 Tahun 2014**

Tiga undang-undang yang mengatur tentang kewenangan, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dirumuskan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah, pemerintahan daerah dapat menjalankan kewenangan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Legitimasi ini menyediakan ruang seluas-luasnya dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangganya sendiri demi kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Dalam rangka mendukung dan memperkuat kebijakan pemerintah di bidang bahasa sesuai dengan amanat UU RI Nomor 22 Tahun 1999, UU RI Nomor 32 Tahun 2004, dan UU RI Nomor 32 Tahun 2014 hak pemerintah daerah telah diatur sebagai berikut, (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, (2) memilih pemimpin daerah, (3) mengelola aparatur daerah, (4) mengelola kekayaan daerah, (5) memungut pajak daerah dan retribusi daerah, (5) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, (7) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan (8) mendapatkan hal lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wewenang dalam konteks otonomi daerah tersebut, pengelolaan kekayaan daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengelola kekayaan daerah termasuk di dalamnya sumber daya bahasa daerah sebagai ciri identitas kedaerahan. Dalam mengelola kekayaan budaya daerah (bahasa daerah), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dalam melakukan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa daerah di dalam wilayah otonom didasarkan pada paradigma desentralisasi, yakni penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat ke daerah otonom untuk mengatur dan mengurus keragaman budayanya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah otonom.

Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah merupakan bagian dari prinsip desentralisasi. Namun, dalam hal membina dan mengembangkan bahasa daerah menjadi tidak jelas pembagian kewenangannya, mana yang harus dikelola oleh pusat dan daerah, serta mana yang menjadi tanggung jawab bersama secara berjenjang dari atas ke bawah (*top down*) atau bawah ke atas (*bottom up*). Aspek kewenangan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat adalah urusan dalam bidang (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) moneter dan fiskal nasional, (5) yustisi, dan (6) agama.

Selain urusan tersebut, terdapat pula urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan wajib mencakup pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, yakni (1) pendidikan dasar, (2) kesehatan, (3) lingkungan hidup, (4) perhubungan, serta (5) kependudukan yang seluruhnya wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Sementara itu, urusan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah itulah yang disebut urusan pilihan. Di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, hal tersebut tetap menjadi kewenangan harus dilakukan dan menjadi kewenangan pemerintahan daerah (otonom).

Di antara urusan wajib dan pilihan, prioritas penyelenggaraan pemerintahan difokuskan pada urusan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan sumber daya dan sumber dana yang tersedia di daerah. Selain urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang



bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan. Dengan mengacu pada pembagian kewenangan tersebut, belum tampak jelas apakah pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa daerah masuk ke dalam kategori wajib atau pilihan.

### **3. Kewenangan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003**

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab VII Pasal 33 mengandung makna legitimasi (1) bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional; (2) bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu; dan (3) bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Senada dengan itu, Dharma (2011: 8) berpendapat bahwa untuk dapat melaksanakan pembinaan bahasa di sekolah, diperlukan kebijakan resmi dari pemerintah daerah untuk memasukkan mata pelajaran bahasa daerah dalam kurikulum. Bagi daerah yang bahasa daerahnya tidak beragam, kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan mudah. Akan tetapi, di daerah yang bahasa daerahnya beragam, pelaksanaan itu sangat susah karena pemilihan salah satu bahasa akan meminggirkan bahasa daerah lain. Pembinaan bahasa daerah melalui jalur pendidikan formal ini merupakan salah satu indikator keberlangsungan hidup bahasa daerah.

### **4. Kewenangan dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009**

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ini memberi legitimasi kewenangan bahwa (a) bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara serta (b) bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, serta kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 dikatakan bahwa (1) pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia; (2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan; dan (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan diatur dalam peraturan pemerintah. Selain itu, dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah juga sedapat mungkin digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia yang dapat melibatkan pihak asing atau pihak lainnya.



Muliastuti (2018) dalam kolom opini *Kompas* menyebutkan bahwa nalar ekonomi sering kali menjadi satu-satunya penentu keputusan di tengah iklim globalisasi dan kapitalisme global seperti sekarang. Selain itu, peminggiran bahasa Indonesia dan bahasa daerah juga menjadi paradoksal dengan Nawacita Pemerintah Joko Widodo yang bersumber dari prinsip Trisakti Bung Karno. Ketiga prinsip Trisakti, yakni “berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan” merupakan adicita ideal Indonesia yang maju, kuat, mandiri, dan kukuh dengan kebudayaan nasionalnya.

Di tengah bertaburannya kewenangan dalam mengembangkan dan membina bahasa lokal di Indonesia, jumlah bahasa-bahasa daerah di Indonesia terus bertambah. Dalam pengelolaannya, terdapat perbedaan jumlah yang valid dari data bahasa di Nusantara. Misalnya, Badan atau Pusat Bahasa, Kemendikbud telah mengidentifikasi 733 bahasa daerah (*Antara News.com*, 2017), sedangkan dalam catatan LIPI terdapat 726 bahasa daerah (*Republika.co.id.*, 2016). Sementara itu, menurut Arif Rachman selaku Ketua Harian Komite Nasional UNESCO, Indonesia memiliki 783 bahasa daerah (*Antara News.com*, 2016). Laporan tahunan *Ethnologue: Language of the World, Edisi ke-20*, mengungkapkan bahwa bahasa daerah di Indonesia berjumlah 719. Dari data bahasa di atas, Badan atau Pusat Bahasa, Kemendikbud Republik Indonesia sejak 1991—2017 telah memvalidasi 652 bahasa dari 2.452 daerah pengamatan.

## **Kewenangan Konteks Lokal Papua**

### **1. Kewenangan dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001**

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan bentuk afirmasi yang berkembang di Indonesia pascareformasi. Undang-undang tersebut telah disahkan dan diundangkan pada 21 November 2001 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua selanjutnya disebut UU Otsus Papua. Warami (2014) menyebutkan bahwa UU Otsus Papua merupakan sebuah dokumen negara yang mengandung sejumlah kewenangan dan kebijakan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang sarat dengan nuansa legitimasi kekuasaan pemerintah. Undang-undang Otsus Papua merupakan keputusan politik yang dikeluarkan sebagai alat kelengkapan politik negara dan proses perumusan perundang-undangannya dianggap sebagai kegiatan yang sarat dengan nuansa politis.

Dalam Bab XVI tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Pasal 58 berbunyi (1) pemerintah provinsi berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua; (2) selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjang pendidikan, dan (3) bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan kewenangan undang-undang yang diberikan tersebut, pemerintah provinsi/kabupaten dan kota se-Tanah Papua diberikan kewenangan untuk membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua. Sejalan dengan itu, implementasi kebijakan otonomi khusus tersebut sudah selayaknya menjadi tugas pemerintah daerah untuk melakukan upaya peningkatan pelestarian bahasa daerah.



Dalam konteks Otsus Papua, pembinaan dan pengembangan yang dikonstruksi dan didayagunakan dalam UU Otsus Papua itu masih sangat terbatas, terutama kesadaran pemerintah daerah (provinsi dan daerah) dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut yang terkesan masih berjalan sendiri-sendiri dalam mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan bahasa daerahnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai jati diri orang Papua.

Fakta saat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya berfokus pada pusat pertumbuhan di kawasan perkotaan, tetapi juga difokuskan pada daerah-daerah pinggiran dan terdepan yang berpotensi menjadi garda terdepan negara. Pembangunan daerah terpinggir dengan kekhususan dan keistimewaan perlu diletakkan fondasi afirmatif, yaitu dengan memberikan kebijakan keberpihakan pada daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan terdepan (3T). Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis-sosial Papua yang memiliki kesenjangan tinggi dari wilayah lain di Nusantara. Untuk itu, diperlukan afirmasi untuk mendorong percepatan pembangunan, pelindungan, dan pengembangan dengan melihat karakteristik kondisi keterisolasian dan kondisi sosial budaya Papua.

## **2. Kewenangan dalam Perdasi Nomor 16 Tahun 2008**

Berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang melahirkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perlindungan atas Kebudayaan Asli Papua pada Bab II, Pasal 2 mengamanatkan kebijakan pelindungan yang mencakup (a) bahasa dan sastra, (b) sistem peralatan hidup dan teknologi, (c) sistem mata pencaharian hidup, (d) organisasi sosial dan sistem kekerabatan, (e) sistem pengetahuan, (f) kesenian, dan (g) kepercayaan. Berdasarkan prinsip pelindungan, upaya yang dilakukan dengan cara menjaga, memelihara, merawat, dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan asli Papua adalah sebagai berikut, (a) inventarisasi dan dokumentasi, (b) pengakuan, (c) pendaftaran, (d) legalisasi, (e) pengumuman, dan (f) litigasi.

Pemerintah daerah mendapat kewenangan untuk melakukan pembinaan kebudayaan asli Papua dalam mempertahankan dan melestarikan kebudayaan asli Papua dengan cara (a) pameran dan pergelaran budaya; (b) penyuluhan kebudayaan; (c) pelatihan kebudayaan; (d) temu karya kebudayaan; (e) penampilan nuansa budaya Papua pada fasilitas umum milik pemerintah, swasta, dan masyarakat; (f) pemuatan materi kebudayaan asli Papua dalam kurikulum muatan lokal pada semua jenjang pendidikan; (h) pesta budaya; (i) festival seni; (j) lomba-lomba; (k) karnaval; dan (l) kegiatan upaya pembinaan lainnya.

Pemerintah daerah mendapat kewenangan untuk melakukan pengembangan kebudayaan asli Papua secara selektif melalui (a) penetapan dalam muatan kurikulum lokal pada semua jenjang pendidikan; (b) pelatihan, seminar, dan lokakarya; (c) latihan-latihan dan kursus-kursus kebudayaan; (d) media massa; (e) misi kebudayaan; (f) perfilman; (g) pusat-pusat kebudayaan; (h) sanggar-sanggar kebudayaan; (i) sanggar-sanggar seni; (j) pasar seni; dan (k) kegiatan pengembangan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Nomor 16 Tahun 2008, tergambar bahwa paradigma kebijakan pengelolaan pembinaan dan pengembangan di Papua terbagi dalam tiga bentuk paradigma yang tertuang dalam tabel berikut.



**Tabel 1 Paradigma Kebijakan**

Pembinaan dan Pengembangan di Papua	Eksplorasi bahasa daerah Papua untuk orang luar Papua Kepentingan ekonomi Pendekatan struktural
Pembinaan dan Pengembangan untuk Papua	Pengelolaan bahasa daerah dengan <i>framework</i> eksternal Kepentingan eksternal Pendekatan prosedural dan manajerial
Pembinaan dan Pengembangan Papua	Pemberdayaan SDM untuk mengelola sendiri warisan budaya (bahasa) Kepentingan berbasis kapasitas lokal Pendekatan behavioris

Sumber: Inovasi Penulis, 2018

## PENUTUP

Fakta menunjukkan bahwa bahasa daerah di Indonesia memiliki daya vitalitas untuk bertahan hidup, berkembang, dan dilindungi oleh negara. Namun, di sisi lain, kondisi vitalitas bahasa daerah yang penuturnya tinggal sedikit sangat berpotensi besar untuk punah. Ancaman kepunahan bahasa daerah menjadi kewenangan negara untuk melindunginya melalui sistem perundang-undangan. Dalam kajian ini dapat disimpulkan dan direfleksikan dalam empat hal berikut. *Pertama*, kebijakan dan perlindungan bahasa daerah di Nusantara melalui kewenangan pemerintah pusat dan daerah merupakan upaya sadar, teratur, dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah yang memiliki legitimasi penuh dalam merawat bahasa yang telah dipilih oleh negara sebagai bahasa yang wajib dilindungi. *Kedua*, koneksitas kebijakan pusat dan daerah dalam membangun nalar serta pola pikir bangsa untuk membangun peradaban bangsa. *Ketiga*, kewenangan pusat dan daerah diharapkan dapat membangun sinergisitas dalam keseriusan membina dan mengembangkan bahasa daerah di Nusantara. *Keempat*, membangun sistem perlindungan terhadap bahasa daerah melalui kebijakan pemerintah pusat dan daerah sehingga akan tercipta prinsip keteladanan dalam merawat sesuai peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. (2011). "Fungsi Politik Bahasa" dalam *Politik Bahasa*. Risalah Seminar Politik Bahasa (Hasan Alwi dan Dendy Sugondo, Ed.). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
- BALEG DPR RI. (2017). *Daftar Program Legislasi Nasional: Rancangan Undang-Undang Tahun 2015—2019*. Jakarta: Sekretariat BALEG DPR RI.
- Bawole, Roni dan Hugo Warami. (2016). *Naskah Akademik Pengelolaan Perikanan di Teluk Wondam*. Wondama: WWF-UNIPA.
- Dharma, Agus. (2011) "Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah". Makalah Seminar Internasional "Language Maintenance and Shift", Semarang, 2 Juli 2011. Magister Program Linguistics, Diponegoro University.
- Farid, Hilmar. (2016, Mei 16). Strategi Kebudayaan Pembangunan "Indonesia Sentris". <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2>.



- Hardyanto. (2018, Ferbruari 28). Indonesia-Bahasa-Dunia.  
[Http://setkab.go.id/indonesia-bahasa-dunia](http://setkab.go.id/indonesia-bahasa-dunia)).
- Kridalaksana, Harimurti. (2011). “Undang-Undang Bahasa sebagai Sarana Pematapan Politik Bahasa Nasional” dalam *Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkokoh Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi*. Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII (Dendy Sugondo, dkk., Peny.). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
- Lapoliwa, Hans. (2011). *Politik Bahasa Nasional* dalam *Politik Bahasa* (Hasan Alwi dan Dendy Sugondo, Ed.). Jakarta: PPB-Kemendikbud.
- Muliastuti, Liliana. (2018, April 16). “Tahun Bahasa Nasional”. *Kompas*, 16 April 2018,
- Warami, Hugo. (2014a). “Papua dalam Jejaring Bahasa Kekuasaan: Studi Kasus UU Otsus Papua” dalam Prosiding Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI). Lampung.
- Warami, Hugo. (2014b). “Legitimasi Kekuasaan dalam UU Otsus Papua: Kajian Wacana Kritis” (Disertasi Doktor). Denpasar: PPs Universitas Udayana Bali.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Hugo Warami  
Judul Makalah: “Kebijakan Dan Perlindungan terhadap Bahasa Daerah:  
Perspektif Kewenangan Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2019  
Pukul : 13.45—15.15  
Moderator : Drs. Agus Sri Danardana, M.Hum.  
Pencatat : Anita Astriawati Ningrum

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang melahirkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perlindungan atas Kebudayaan Asli Papua pada Bab II, Pasal 2 yang mengamanatkan tentang Kebijakan Perlindungan mencakup (a) bahasa dan sastra; (b) sistem peralatan hidup dan teknologi; (c) sistem mata pencaharian hidup; (d) organisasi sosial dan sistem kekerabatan; (e) sistem pengetahuan; (f) kesenian; dan (g) kepercayaan.
2. Pemerintah daerah mendapat kewenangan untuk melakukan pembinaan kebudayaan asli Papua dalam mempertahankan dan melestarikan kebudayaan asli Papua dengan cara (a) pameran dan pergelaran budaya; (b) penyuluhan kebudayaan; (c) pelatihan kebudayaan; (d) temu karya kebudayaan; (e) penampilan nuansa budaya Papua di fasilitas umum milik pemerintah, swasta dan masyarakat; (f) pemuatan materi kebudayaan asli Papua dalam kurikulum muatan lokal di semua jenjang pendidikan; (h) pesta budaya; (i) festival seni; (j) lomba-lomba; (k) karnaval; dan (l) kegiatan upaya pembinaan lainnya.
3. Sampai hari ini belum ada sinkronisasi antarinstansi.
4. Kewenangan pusat dan daerah diharapkan dapat membangun sinergisitas dalam keseriusan membina dan mengembangkan bahasa daerah di Nusantara.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : David Latu Perisa

Instansi :

**Pertanyaan:**

Kewenangan adalah masalah klasik. Mengapa peserta Kongres Bahasa Indonesia XI harus datang menemu Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Istana? Mengapa bukan dia yang datang ke acara ini? Jika dianalisis dengan AWK, Kongres ini dianggap tidak penting oleh Wapres

**Jawaban:**

Hal ini terkait pelimpahan kewenangan. Pemerintah belum berpihak pada bahasa dan sastra. Otonomi daerah dan khusus masih Indonesiasentris, semua masih berpusat pada Jakarta.





**Penanya 4**

Nama : Zufrizal

Instansi : Universitas Negeri Padang

**Pertanyaan:**

Peraturan tidak mungkin jalan tanpa kontrol dan tinjau ulang.

**Jawaban:**

Ada gejolak tidak di Papua?

**Penanya 5**

Nama : Ani Faiqoh

Instansi : Kendal

**Pertanyaan:**

Peraturan gubernur tentang penggunaan bahasa Jawa selama dua jam per minggu untuk setiap jenjang pendidikan. Di Jawa Tengah terdapat empat dialek unggulan. MGMP menyepakati untuk mengajarkan dialek daerah masing-masing sebagai kearifan lokal. Muatan lokal dijadikan mapel nasional yang masuk ke dalam kurikulum dan diserahkan kepada daerah masing-masing untuk pengembangannya. Perda dan pergub hanya formalitas karena tidak ada pengawasan dan tidak ada sanksi.

Undang-undang mengharapkan provinsi yang mengambil alih.

Pemerintah perlu lebih banyak melakukan fasilitasi melalui balai bahasa. Perguruan tinggi diharapkan mampu berperan lebih banyak.

**Jawaban:**

Polanya sudah baik, sudah ada perda. Pelaksanaan disesuaikan dengan daerah (dialek disesuaikan) itu sudah benar. Perda berkaitan dengan dialek juga bisa dibuat.

Guru informal mungkin dianggap sudah siap. Bahasa sebagai budaya basisnya adalah keluarga.

Aceh konflik politik, bukan konflik budaya.



## 7. Makin Ramai berkat Rancage: Seratus Tahun Perkembangan Sastra Bali Modern

### MAKIN RAMAI BERKAT RANCAGE: SERATUS TAHUN PERKEMBANGAN SASTRA BALI MODERN

I Nyoman Darma Putra  
Universitas Udayana  
idarmaputra@yahoo.com

#### Abstrak

Makalah ini mengkaji perkembangan sastra Bali modern dalam seratus tahun terakhir dengan fokus peran Hadiah Sastra Rancage sejak akhir 1990-an. Topik ini penting untuk diteliti guna mengetahui sebab-sebab kesenjangan dan perkembangan sastra Bali modern. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud memberikan apresiasi pada Yayasan Kebudayaan Rancage yang sudah mengabdikan lebih dari tiga puluh tahun dalam membina perkembangan sastra daerah, termasuk sastra Sunda, Jawa, Bali, dan Batak. Kajian dilaksanakan melalui pendekatan historis dengan menunjukkan contoh-contoh karya dan peristiwa yang mewarnai tonggak-tonggak perkembangan sastra Bali modern. Makalah ini menyimpulkan bahwa sastra Bali modern sejak awal perkembangannya, mulai zaman kolonial sampai zaman kemerdekaan, tepatnya hingga tahun 1980-an, diwarnai kevakuman, dan baru mulai ramai setelah diikutkan dalam penerimaan Hadiah Sastra Rancage tahun 1998. Ke depan, kehidupan sastra Bali modern akan tetap stabil karena fondasinya sudah kuat dan hadirnya pendukung eksternal, seperti pelestarian bahasa dan teknologi cetak dan distribusi buku sastra yang kian maju. Meskipun demikian, bentuk apresiasi berupa hadiah sastra tetap diperlukan untuk memotivasi sastrawan dalam menciptakan karya sastra.

**Kata-kata kunci:** sastra Bali modern, Hadiah Sastra Rancage, sejarah sastra daerah

#### Abstract

*This paper examines the development of modern literature in the Balinese language in the last hundred years with the focus on the role of Rancage Literary Award since the late 1990s. This topic is important in order to examine the causes of and the gap in the development of Modern Balinese Literature. In addition, the study recognises the achievements of the Rancage Culture Foundation, which has served more than 30 years in fostering the development of regional literature in the Sundanese, Javanese, Balinese and Batak languages, amongst others. The study uses a historical approach to show examples of works of literature and events that mark milestones in the development of modern Balinese literature. The paper concludes that modern Balinese literature from its beginnings in the colonial era up to the independence era, precisely until the 1980s, was marked by a vacuum, and only began to be lively after being included among the recipients of the Rancage Literary Award in 1998. Looking forward, the life of modern Balinese literature will remain stable because the foundations have been solid, there is growing spirit in language preservation and print technology and the distribution of literary books is increasingly advanced. However, appreciation in the form of literary awards like that of Rancage is still needed to motivate writers to write.*



**Keywords:** *modern Balinese literature, Rancage literary prize, history of regional literature*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan awal kelahirannya pada zaman kolonial Belanda tahun 1910-an sampai dewasa ini, sastra Bali modern kini sudah berusia lebih dari seratus tahun. Dalam rentang kehidupan lebih dari satu abad itu, kehidupan sastra Bali modern itu sayup-sayup sampai alias memprihatinkan (Putra, 2010; Eddy, 1991; Bagus, 2002). Para sarjana, sastrawan, dan pengamat sering melukiskan kehidupan sastra Bali modern itu dengan pepatah, *seperti kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau*. Saat memasuki awal tahun 2000-an, barulah kehidupan sastra Bali modern mulai menggeliat, menyusul disertakannya sastra Bali modern dalam pemberian Hadiah Sastra Rancage. Sebelumnya, Hadiah Sastra Rancage yang diberikan oleh Yayasan Kebudayaan Rancage, Bandung, itu hanya untuk sastra Sunda dan Jawa (Etti dkk., 2013).

Makalah ini membahas kehidupan sastra Bali modern dalam seratus tahun dengan memberikan penekanan pada peranan Hadiah Sastra Rancage. Pembahasan diawali dengan lanskap atau kehidupan sastra di Bali secara umum, sejarah ringkas kelahiran dan perkembangan sastra Bali modern sebelum pemberian Hadiah Sastra Rancage, serta kontribusi Hadiah Sastra Rancage dalam perkembangan sastra Bali modern. Selain itu, makalah ini juga membahas kecenderungan tematik karya, latar belakang penulisnya, dan sumbangan sastra Bali modern pada kehidupan seni budaya di Bali.

## LANDASAN TEORI

Dunia sastra di Bali adalah lanskap yang heterogen, bukan homogen. Heterogenitas lanskap sastra di Bali dibuktikan dengan hadirnya tiga jenis sastra, yaitu sastra Bali tradisional, sastra Bali modern, dan sastra Indonesia. Ketiga sastra ini hidup berdampingan dan saling memengaruhi di Bali dengan ciri dan riwayat masing-masing.

Sastra Bali tradisional berkembang mulai abad ke-13 dan mencapai abad keemasan pada abad ke-16, serta mendapat pengaruh dari sastra Jawa Kuna (Creese, 1999; Agastia, 1994). Epik Ramayana dan Mahabharata merupakan sumber inspirasi yang paling besar untuk karya-karya sastra Bali tradisional. Selain itu, kisah-kisah cerita panji dari Jawa dan dari luar negeri seperti kisah *Sampek Ing Tay* dari Cina juga menjadi inspirasi karya sastra Bali tradisional (Zoete and Spies, 1938; Vickers, 2005). Kisah-kisah Panji dan *Sampek Ing Tay* juga menjadi lakon pementasan seni pertunjukan Bali.

Jika dilihat dari bentuknya, sastra Bali tradisional dibedakan menjadi tiga, yaitu *gancaran* (prosa), *tembang* (puisi), dan *palawakya* (prosa berirama berbahasa Kawi/Jawa Kuna). Bentuk yang paling populer dari ketiga bentuk sastra Bali tradisional itu adalah tembang. Karya tembang adalah karya sastra puisi yang apresiasinya melalui penembangan dan penafsiran baris demi baris dalam aktivitas yang dikenal dengan beberapa istilah, seperti *mabebasan* (seni berbahasa), *mashanti*, dan *gita shanti* (nyanyian suci). Sementara itu, jenis puisi tradisional Bali dibedakan menjadi empat, yaitu *sekar agung* (kakawin), *sekar madya* (kidung), *sekar alit* (geguritan, macapatan), dan *sekar rare* (lagu anak-anak). Karakteristik karya puisi *kakawin* ditulis dalam bahasa Jawa Kuna, berpola panjang-pendek *guru-*



*lagu*, dilantunkan sesuai dengan irama, dan diberikan pemaknaan baris demi baris, serta banyak mengambil tema epos *Ramayana* atau *Mahabharata*.

Kidung adalah nyanyian untuk pengiring upacara yang menggunakan bahasa Bali halus dan dinyanyikan bersama tanpa disertai penafsiran baris demi baris seperti *kakawin*. Geguritan menggunakan bahasa Bali biasa, ditulis dalam pola tembang atau *pupuh* dengan ketentuan yang sudah pasti untuk jumlah baris kalimat dalam satu bait, jumlah suku kata dalam satu baris, dan bunyi akhir dalam satu baris. Ketentuan dalam penulisan geguritan ini disebut dengan *padalingsa*. Sumber atau tema cerita dalam geguritan juga berasal dari epos *Ramayana*, *Mahabharata*, kisah *Panji*, ajaran agama, dan masalah kontemporer, seperti *Geguritan Melaspas Sekolah (Puisi Peresmian Sekolah, 1939)*, *Gita Reformasi (1998)*, *Geguritan Kesehatan (Puisi Kesehatan, tt)*, atau *Geguritan Tembok Tegeh (Tembok Tinggi/Penjara, 2003)*.

*Sekar Rare* adalah lagu anak-anak yang bersifat hiburan dengan menggunakan bahasa Bali sederhana yang mudah dimengerti anak-anak serta bertema jenaka dan/atau bersifat didaktik. Lagu anak-anak juga sering dijadikan dasar untuk seni permainan atau pertunjukan anak-anak yang dikombinasikan dengan tari, gerak, dan diiringi gamelan.

Seni geguritan ikut membuat kehidupan sastra Bali tradisional lebih semarak, terutama setelah munculnya acara kidung interaktif di radio-radio dan televisi di Bali (Creese, 2009; Putra, 2009). Puluhan radio dan dua stasiun televisi memiliki acara kidung interaktif. Lewat acara interaktif tersebut, pendengar dapat mendengarkan tembang dari rumah lewat telepon. Banyak yang semula tidak bisa menembang, mulai belajar dan mendapat rasa percaya diri untuk melantunkan geguritan lewat kidung interaktif di radio atau televisi. Kidung interaktif mendorong sastrawan mengubah atau menciptakan karya geguritan dan ikut mendorong berkembangnya komunitas *gita shanti*, yang kegiatannya tidak saja melantunkan tembang untuk pelipur lara, tetapi juga mengiringi upacara agama atau adat.

Sastra Bali modern bermula tahun 1910-an, memang jauh lebih dulu jika dibandingkan dengan sastra tradisional. Sastra Bali modern menggunakan bentuk sastra modern, seperti puisi, cerita pendek, dan drama. Bentuk-bentuk ini sama dengan yang ada dalam sastra Indonesia (lihat di bawah). Sastra Bali modern menggunakan bahasa Bali, baik ragam halus maupun ragam biasa (*kepara*). Tema karya yang ditulis kebanyakan adalah masalah kontemporer; dituangkan dalam puisi atau cerita pendek, novel, atau drama. Ketika awal pertumbuhannya, bentuk sastra Bali modern yang muncul adalah cerita pendek yang menjadi bahan bacaan buku teks sekolah dasar, ditulis para guru. Belakangan muncul novel, puisi, drama, dan juga cerita pendek.

Sastra Indonesia modern adalah sastra yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan bentuknya, sastra Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu puisi, prosa, dan drama. Sastra Indonesia berawal dari sastra Melayu dan dianggap bermula pada tahun 1920-an yang ditandai terbitnya roman dan puisi dengan semangat keindonesiaan, puisi “Bahasa, Bangsa” (1921) karya Mohamad Yamin, roman *Azab dan Sengsara* (1920) karya Merari Siregar, serta *Sitti Nurbaya* (1922) karya Marah Rusli.

Jejak sastra Indonesia di Bali dapat ditelusuri pada tahun 1920-an, terlihat dari puisi dan (sebuah) naskah drama yang terbit di surat kabar lokal, seperti *Surya*



*Kanta* dan *Bali Adnyana*. Satu-satunya drama yang terbit adalah *Kesetiaan Perempuan* (1927), tanpa nama penulis, terbit di *Surya Kanta*. Drama bertema konflik kasta ini merupakan naskah pertama yang hadir dalam lanskap sastra Indonesia di Bali (Bagus, 1996; Putra, 2011). Karya-karya sastra Indonesia dari pengarang Bali, kemudian muncul dalam majalah *Bawanegara* dan *Djatajoe*, terbit di Singaraja, Bali Utara.

Pengarang terkenal Bali yang berkontribusi dalam memperkaya lanskap sastra Indonesia adalah Panji Tisna melalui karya *Ni Rawit Ceti Penjual Orang* (1935), *Sukreni Gadis Bali* (1936), dan *I Swasta Setahun di Bedahulu* (1938). Sesudah kemerdekaan, bahkan dewasa ini, banyak penulis Bali yang masuk dalam jajaran sastrawan Indonesia terkemuka, seperti Putu Wijaya, Nyoman Rasta Sindhu, Cok Sawitri, Oka Rusmini, Aryantha Soethama, dan Ida Bagus Sindhu Putra. Tiga nama terakhir pernah meraih hadiah Sastra Khatulistiwa, bahkan Oka Rusmini mendapat anugerah sastra Asia Tenggara (SEA Write Award). Anugerah-anugerah sastra ini membuat sastrawan Bali lebih kuat tercatat dalam barisan sastrawan Indonesia.

Heterogenitas sastra di Bali juga ditandai dengan heterogenitas kreativitas sastrawan menjadi penulis dwibahasa atau multibahasa. Artinya, sastrawan tidak hanya menekuni atau menulis satu jenis sastra, tetapi juga berkarya lintas jenis atau lintas bahasa. Ada sastrawan yang menulis ketiga jenis sastra. I Made Sanggra dan I Nyoman Manda, misalnya, awalnya menulis puisi berbahasa Indonesia, sastra Bali tradisional, dan sastra Bali modern. Kreativitas yang sama juga tampak pada penulis muda, seperti Raka Kusuma, Mas Ruscitadewi, dan I Putu Supartika. Putu Supartika menerbitkan buku kumpulan cerpen berbahasa Bali *Yen Benjang Tiang Dados Presiden (Kalau Besok Saya Jadi Presiden)*, (2014), sedangkan cerpennya yang berbahasa Indonesia terbit di harian *Kompas* edisi Minggu sehingga dia bisa dijuluki sebagai sastrawan dwibahasa.

Hidup berdampingan dalam lanskap heterogenitas membuat ketiga sastra saling memengaruhi. Hal itu terjadi lewat berbagai bentuk, seperti adaptasi cerita tradisional ke novel, seperti terlihat dalam karya Cok Sawitri berjudul *Tantri, Perempuan yang Bercerita* (2011) yang menggunakan sumber *Cerita Ni Dyah Tantri* khazanah sastra Bali tradisional (Putra, 2012), dan juga lewat penerjemahan sastra Indonesia ke dalam bahasa Bali, dan sastra Bali ke dalam bahasa Indonesia. Novel Sutan Takdir Alisjahbana, *Layar Terkembang* diterjemahkan I Nyoman Manda ke dalam bahasa Bali. Karya terjemahan ini, di satu pihak untuk memperkaya khazanah sastra Bali modern, di pihak lain menguji sejauh mana kemampuan bahasa Bali dalam mengungkapkan gagasan dari bahasa Indonesia.

Jika lanskap sastra di Bali diperhatikan, akan tampak bahwa kehidupan sastra Bali tradisional paling semarak karena banyak penggemar dan sifatnya yang fungsional sebagai pengiring upacara adat atau agama. Apresiasi geguritan di radio dan televisi juga merupakan bukti semaraknya kehidupan sastra Bali tradisional. Sementara itu, jumlah penggemar sastra Bali modern dan sastra Indonesia tidak sebanyak penggemar sastra Bali tradisional. Kehidupan sastra Bali modern, bahkan penuh pasang surut atau sunyi senyap seperti dibahas dalam subbab berikut.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan sejarah sastra Bali modern ini merupakan kajian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dan dianalisis dengan metode kualitatif. Myoritas sumber data berasal dari arsip media mengenai sastra Bali modern, karya sastra, dokumen



keputusan dewan juri Hadiah Sastra Rancage dari tahun ke tahun sejak sastra Bali modern diikutkan sebagai penerima hadiah. Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi aktif, seperti ikut dalam pertemuan-pertemuan apresiasi atau diskusi sastra Bali modern, observasi mengikuti acara penyerahan Hadiah Sastra Rancage, dan mewawancarai penggiat atau penulis sastra Bali modern.

Data yang terkumpul berupa dokumen, kliping koran/media massa hasil wawancara, dan karya sastra dianalisis untuk menguraikan perkembangan sastra Bali modern dalam rentang seratus tahun terakhir. Untuk mengetahui kecenderungan tematik dalam perkembangan sastra Bali modern, karya-karya dikaji dengan pendekatan intrinsik dengan menyimak tema dan menyusun gambaran tema-tema yang muncul berulang. Uraian tentang tema diikuti dengan kajian tentang latar belakang penulis sastra Bali modern untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan sastra Bali modern. Uraian disusun dengan kronologis dan tematik.

## PEMBAHASAN

### Perkembangan Sastra Bali Modern Penuh Kesenjangan

Sastra Bali modern berawal tahun 1910-an dengan ditandai terbitnya sejumlah cerita pendek yang menjadi bagian dari buku pelajaran sekolah yang dibangun pemerintah kolonial Belanda. Hingga dewasa ini, tahun 2010-an, sastra Bali modern sudah berusia lebih dari seratus tahun.

Dalam rentang waktu lebih dari seabad itu, perkembangan sastra Bali modern dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu (a) fase awal atau zaman kolonial, 1910-an–1940-an; (b) fase kemerdekaan, 1950-an–1980-an; dan (c) fase Hadiah Sastra Rancage, 1990-an sampai sekarang. Dari ketiga fase itu, dua fase pertama, dalam rentang waktu sekitar 70 tahun, kehidupan sastra Bali modern mengalami banyak kesenjangan atau kevakuman. Berikut diuraikan secara ringkas perkembangan sastra Bali modern berdasarkan fase-fase yang ada. Dua fase diuraikan dalam subbab ini, sedangkan fase terakhir diuraikan dalam subbab berikutnya.

*Pertama*, fase awal zaman kolonial ditandai dengan terbitnya beberapa cerita pendek dalam buku pelajaran sekolah. Cerpen-cerpen tersebut merupakan karya guru-guru, yaitu I Made Pasek dan Mas Nitisastro. Cerpen mereka disertakan dalam buku *Tonggak Baru Sastra Bali Modern* karya Putra (2010 [2000]). Pada fase ini juga terbit novel *Nemu Karma* (1931) karya I Wayan Gobiah, yang merupakan novel pertama Sastra Bali Modern. Novel kedua, *Mlatjaran ka Sasak* (Melawat ke Sasak) karya Gde Srawana yang terbit bersambung di majalah *Djatajoe* tahun 1939–1941 (tidak tamat). Yayasan Sabha Sastra Bali menerbitkan novel ini tahun 1978, dalam bentuk stensilan. Dalam fase awal ini, tidak lagi ditemukan karya sastra berbahasa Bali, kecuali beberapa cerpen dan dua novel.

Pada zaman revolusi merebut dan mempertahankan kemerdekaan, tidak ditemukan karya sastra Bali modern yang terbit. Dengan demikian, batas fase awal zaman kolonial ini adalah sampai awal 1940-an. Jumlah karya yang terbit sangat sedikit. Namun, realitas ini tidak mengherankan karena karya sastra lain, seperti sastra Indonesia dan sastra Bali tradisional juga tidak banyak dalam periode ini.

*Kedua*, fase kemerdekaan sampai reformasi, 1950-an sampai 1990-an akhir, juga merupakan fase penuh kekosongan. Pada masa itu, hanya ada satu puisi yang terbit, yang merupakan karya pertama untuk bentuk puisi. Puisi yang muncul



periode itu adalah sebuah puisi berjudul “Basa Bali” (Bahasa Bali) karya Suntari Pr. yang terbit dalam majalah *Medan Bahasa Basa Bali*, No. 1, Th. I Maret 1959. Anehnya, siapa Suntari Pr. sampai sekarang tidak ada yang tahu, apakah orang Bali atau bukan. Namanya tidak berciri kelaziman nama Bali, seperti Wayan, Made, Nyoman, Ketut, Anak Agung, atau Ida Bagus. Meski identitas lengkap pengarang tidak diketahui, karya yang ditulis Suntari Pr. menempatkan posisi penting dalam fase perkembangan sastra Bali modern karena inilah karya puisi pertama yang terbit dan paling terkenal jika dibandingkan dengan karya lainnya dalam sastra Bali modern. Judul dan isinya pun menarik karena relevan dengan eksistensi sastra Bali modern yang ditulis dalam bahasa ibu. Ungkapan kecintaan akan bahasa ibu menjadi tema utama pada puisi ini, sebagai ekspresi pada cinta bahasa dan ‘tanah air’ Bali. Puisi itu mengingatkan kita pada puisi “Bahasa, Bangsa” karya Mohammad Yamin yang hadir tiga puluh tahun sebelumnya.

Seperti tecermin dari judulnya, sajak ini menyampaikan rasa kagumnya pada bahasa Bali, sebagai bahasa ibu yang bisa dijadikan alat komunikasi sesama warga Bali. Sejalan dengan perkembangan zaman, ekspresi baru diselipkan jika bahasa Bali tidak memiliki kosakata tersebut. Berikut kutipan penuh puisi tersebut disertai terjemahan bahasa Indonesiannya.

Basa Bali Bahasa Bali  
Suntari Pr

*Tan uning titiang ring kerananipun  
Sukseman titiange kategul antuk benang sutera  
Ngerandjing menjusup tulang ngantos  
kesumsum Sane dados bagian awak titiange  
Sareng maurip saking ajunan  
ngantos kelih  
Seduke ngipi, memanah tur ngemedalang rasa*

Tak tahu aku sebab musababnya  
Hatiku bagai terikat benang sutra  
Masuk menyusup ke tulang hingga ke sumsum  
Yang menjadi bagian tubuhku  
Hidup bersama sejak kecil  
hingga dewasa  
Sejak mimpi, berpikir dan mengekspresikan  
perasaan

*Ring sadjeroning basa Ibu  
Manah titiange sampun kelih antuk tjajane  
Keborbor suksman titiange antuk tjajane,  
Titiang manggihin pribadin titiange*

Dalam pelukan bahasa Ibu,  
Hatiku sudah matang berkat cahayanya,  
Terbakar sukma oleh cahayanya  
Aku menemukan pribadiku

*Titiang magubugan ring masarakat  
Terus masemetonang sareng sawitra  
Baktin titiang ring rerama nentendja kirang  
Kasih-kinasihnan sareng alit-alite.*

Aku berlaku dalam masyarakat  
Lalu berkerabat dengan sahabat  
Baktiku pada orang tua, tidaklah kurang,  
Berkasih-kasihnan dengan  
anak-anak.

*Sane entjen kirang terang kapikajun,  
Titiang njelipang rawos anjar,  
Anggen titiang pajas sane  
tjotjok ring kala puniki  
Kepanggih rupanipun  
ngenjagang manah.*

Yang mana kurang masuk akal,  
Aku menyelipkan kata baru,  
Kujadikan hiasan yang  
cocok saat sekarang,  
Terlihat rupanya  
memilukan hati.



Selain puisi di atas, tidak ada karya lain yang tercatat sehingga dalam fase ini pun sastra Bali modern mengalami kesenjangan alias kevakuman. Kesenjangan kehidupan sastra Bali modern tidak saja terjadi pada era kolonial dan awal kemerdekaan Indonesia, tetapi juga berlanjut sampai tahun 1990-an. Kesenjangan itu membuat sejumlah sarjana, sastrawan, dan budayawan di bawah inisiatif I Gusti Ngurah Bagus melaksanakan pertemuan untuk pengembangan sastra Bali. Jalan yang ditempuh adalah mengadakan sayembara-sayembara. Oleh karena itu, sastra Bali modern pernah dijuluki ‘sastra sayembara’ (Jendra, 1976).

Langkah sayembara mampu memotivasi pengarang untuk menulis, tidak untuk mengejar hadiah materi, tetapi karena “rasa bangga”. Cerpen *Ketemu ring Tampaksiring (Bertemu di Tampaksiring)* karya I Made Sanggra merupakan salah satu cerpen juara sayembara awal 1970-an. Cerpen ini terkenal sampai sekarang, ikut memperkuat eksistensi sastra Bali modern, bersama sedikit karya lainnya. Usaha-usaha sayembara itu memungkinkan Ngurah Bagus lewat lembaga Balai Bahasa menerbitkan beberapa buku bunga rampai karya sastra Bali modern, seperti *Kembang Rampo Kasusatraan Bali* (1978) yang memuat puisi, cerpen, dan drama. Buku-buku ini menjadi korpus yang mendeklarasikan eksistensi sastra Bali modern. Namun, karena jumlahnya terbatas, buku-buku itu hanya ditujukan untuk kalangan penulis, kaum akademisi, dan mahasiswa jurusan Bahasa Bali. Buku-buku itu tidak sampai ke masyarakat luas. Sekolah-sekolah tidak memiliki ruang atau jam pelajaran bahasa daerah yang cukup untuk memperkenalkan sastra Bali modern. Hal itu melemahkan penulis untuk berkarya. Mereka lalu menulis sastra Bali tradisional atau sastra Indonesia (modern).

Selain melakukan sayembara, sastrawan, sarjana, dan budayawan dalam sebuah pertemuan tahun 1969 juga mengambil inisiatif untuk menerbitkan majalah berbahasa Bali atau mendorong media massa yang ada untuk membuka rubrik sastra Bali modern. Usaha yang berhasil dilakukan adalah melobi surat kabar *Suluh Marhaen* (sekarang *Bali Post*) yang kemudian sudi membuka rubrik Sabha Sastra. Rubrik ini memuat puisi, ulasan, dan cerita pendek berbahasa Bali. Di luar tradisi sayembara untuk merangsang penulis berkarya, mulai 1969 hadir ruang bagi penulis di surat kabar untuk memublikasikan karya. Namun, hal ini hanya berlangsung sekitar dua tahun. Program Sabha Sastra banyak yang tidak jalan karena ditinggal oleh tokohnya, I Gusti Ngurah Bagus, untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda.

Antara tahun 1970-an dan 1980-an, nasib sastra Bali modern kembali menghadapi masa surut. Sesekali terbit buku antologi puisi atau cerpen sastra Bali modern dalam bentuk stensilan yang diusahakan oleh pengarangnya sendiri. Koran *Bali Post* memuat secara bersambung novel berbahasa Bali, lalu diterbitkan oleh penerbit lain, seperti *Tresnane Lebur Ajur Satonden Kembang (Cintanya Hancur Lebur sebelum Berkembang; 1984)* karya Djelantik Santa. Sastrawan yang tekun berkarya walau sulit memublikasikan karyanya adalah I Made Sanggra, I Ketut Suwidja, dan I Nyoman Manda. Namun, mereka juga menulis karya sastra Indonesia dan sastra Bali tradisional. Kelompok penulis muda yang belajar sastra Bali di perguruan tinggi dan kalangan wartawan juga menunjukkan komitmen untuk menumbuhkan sastra Bali. Mereka menerbitkan majalah berbahasa Bali, seperti *Kulkul*, tetapi hanya bertahan beberapa bulan.





Melihat situasi kehidupan sastra Bali modern, tidak mengherankan jika orang berkata bahwa sastra Bali mandek atau mati (Setia, 1987). Suara-suara pesimistis terhadap eksistensi sastra Bali modern pun terus berkumandang. Tahun 1987, misalnya, wartawan *Tempo*, Putu Setia dalam bukunya *Menggugat Bali* menegaskan bahwa lonceng kematian sastra Bali dari yang tradisional sampai yang modern telah berbunyi nyaring (1987: 126). Pernyataan ini tentu saja berlebihan karena kenyataannya sastra Bali (tradisional atau modern) tidaklah sungguh telah mati. Sastra Bali memang kalah semarak dengan kehidupan cabang seni lainnya, seperti tari, gamelan, dan lagu pop Bali. Penilaian pesimistis ini merupakan peringatan (*warning*) yang membuat para penulis sastra Bali modern merasa tertantang.

Dalam masa krisis demikian, Made Sanggra menerbitkan buku kumpulan puisi *Kidung Republik* (1997) dengan usaha dan biaya yang diperoleh dari kemurahan hati sponsor. Kehadiran antologi puisi ini tidak serta-merta menggeliatkan kehidupan sastra Bali modern, tetapi hanya menegaskan bahwa sastra Bali modern belum mati. Novel *Sunari* karya I Ketut Rida merupakan perkecualian karena diterbitkan oleh penerbit Yayasan Obor yang sudah terkenal, pada tahun 1999, Sembilan belas tahun sejak ditulis pertama pada 1980. Walaupun dicetak *offset* (bukan lagi stensilan seperti buku-buku sebelumnya) dan bersampul warna, dengan harapan menarik hati banyak pembeli, secara umum buku sastra memang kurang laku. Bahkan, lebih kurang laku lagi adalah buku-buku sastra Bali modern yang dengan mudah difoto kopi, seolah meneruskan tradisi menyalin lontar.

### **Makin Ramai berkat Rancage**

Memasuki akhir tahun 1990-an, perkembangan sastra Bali modern memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya pada tahun 1998, Ketua Yayasan Kebudayaan Rancage, Ajip Rosidi memasukkan sastra Bali modern sebagai penerima Hadiah Sastra Rancage. Untuk melakukan seleksi dan nomine yang layak menerima penghargaan, Ajip Rosidi menunjuk Nyoman Tusthi Eddy, seorang guru, sastrawan, dan kritikus sastra. Tusthi Eddy menulis kritik sastra Indonesia, puisi Bali modern, dan juga menerbitkan buku sastra Bali modern berjudul *Mengenal Sastra Bali Bali Modern* (1991).

Penerima pertama Hadiah Sastra Rancage untuk buku terbaik tahun 1997 adalah buku puisi *Kidung Republik* karya I Made Sanggra, sedangkan untuk tokoh yang berjasa dalam pengembangan sastra Bali modern adalah I Nyoman Manda. Anugerah itu diserahkan pada tahun 1998. Ketika tahun seleksi tahun 1997 dilaksanakan, kemungkinan besar hanya ada satu buku sastra Bali modern yang layak diseleksi. Ini untuk menegaskan bahwa tidak banyak ada buku yang diseleksi. Walaupun demikian, tetap harus dikatakan bahwa sajak-sajak I Made Sanggra dalam antologi *Kidung Republik* adalah karya puisi yang hebat dan pantas mendapat anugerah.

Tidak lama berselang, buku sastra yang terbit terus bertambah. Tahun 2000, jumlah buku yang terbit per tahun meningkat, antara 5 sampai 17 judul. Kalau dirata-rata dalam 10 tahun terakhir, ada sekitar delapan buku sastra Bali yang terbit per tahun. Tentu saja jumlah ini masih kecil, tetapi dapat dibayangkan bahwa angka itu akan sangat jauh kecil jika rangsangan dari Rancage tidak ada sama sekali. Untuk seleksi penerima hadiah, mulai tahun keempat dipercayakan kepada penulis sampai sekarang.



Kehidupan sastra Bali modern sesudah mendapat rangsangan Hadiah Sastra Rancage makin ramai. Arti penting Hadiah Sastra Rancage terhadap kehidupan sastra Bali modern dapat dirumuskan dalam beberapa poin berikut.

*Pertama*, Hadiah Sastra Rancage memberikan motivasi bagi penulis untuk berkarya, baik bagi penulis “lama” maupun “pendatang baru”. Motivasi menulis untuk mendapat hadiah sastra tidak harus dilihat secara negatif, apalagi sastra Bali modern memiliki predikat masa lalu sebagai “sastra sayembara”. Penciptaan karya sastra untuk mengikuti sebuah sayembara merupakan hal positif bagi penulis untuk menghasilkan karya terbaiknya. Bagi pembaca, hadirnya karya yang baik adalah hal yang ideal.

*Kedua*, Hadiah Sastra Rancage telah mendorong pencinta sastra Bali modern untuk memberikan perhatian lebih serius tentang eksistensi sastranya. Ada semacam rasa “malu” bagaimana bisa sastra Bali diberikan penghargaan oleh “orang luar”, maksudnya Yayasan Kebudayaan Rancage. Hal ini dibuktikan dengan usaha menerbitkan majalah sastra, seperti *Kukul*, *Canang Sari*, *Buratwangi*, dan majalah *Satua* (Cerita) sebagai jalan mengembangkan kehidupan sastra Bali modern. Kehadiran media massa ini disambut para penulis dengan mengirimkan karangannya, tetapi dianggap belum mampu menyemarakkan kehidupan sastra Bali modern karena sirkulasinya terbatas dan berumur pendek alias mati muda.

*Ketiga*, mendorong komunitas sastra Bali modern untuk kembali melobi surat kabar terbesar di Bali, dalam hal ini *Bali Post*, untuk menerbitkan edisi khusus atau suplemen berbahasa Bali sebagai media untuk memublikasikan dan mendekatkan sastra Bali modern ke masyarakat luas. Usaha ini berhasil, buktinya sejak Agustus 2006, *Bali Post* edisi Minggu, hadir dengan suplemen Bali Orti. Suplemen ini terdiri atas delapan halaman, memuat fitur, cerita bersambung, puisi, cerpen, profil, dan esai sastra. Kalau dahulu rubrik Sabha Sastra di *Suluh Marhaen* hanya setengah halaman, kini lebih luas ruangnya. Bali Orti inilah yang kini merupakan satu-satunya media massa yang menjadi pilar penting kehidupan sastra Bali modern. Penulis-penulis muda memublikasikan cerpennya di Bali Orti, kemudian menerbitkan antologi cerpen dan karya lainnya untuk diajukan dalam nominasi Hadiah Sastra Rancage. Belakangan, surat kabar *Pos Bali* juga membuka rubrik sastra Bali setiap minggu, memuat cerpen, puisi, dan artikel dalam bahasa Bali. Media ini menambah ruang bagi sastrawan untuk menulis.

Menjadi penulis dan tokoh yang mendapat Hadiah Sastra Rancage merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka. Mereka terus menulis, menerbitkan buku puisi, cerpen, atau novel sehingga menambah terus kuantitas dan kualitas korpus sastra Bali modern. Penambahan korpus itu juga terjadi lewat publikasi karya di Bali Orti dan *Pos Bali*. Boleh dikatakan bahwa dalam lima belas tahun terakhir ini kehidupan sastra Bali modern cukup stabil, tidak ada lagi jeda panjang serta kosong karya, seperti tahun 1930-an, 1940-an, dan 1970-an.

Sistem pemerintahan otonomi daerah telah menimbulkan semangat baru bagi daerah-daerah untuk mengembangkan atau mengajarkan bahasa daerah di sekolah-sekolah. Hal itu menimbulkan peluang kerja baru bagi guru bahasa dan sastra daerah. Di Bali hal ini nyata sekali. Dulu, hanya Universitas Udayana yang membuka jurusan Bahasa dan Sastra Bali. Sejak otonomi daerah, jurusan itu ditawarkan oleh beberapa lembaga pendidikan tinggi lainnya, seperti Universitas Dwijendra, IKIP PGRI Bali, dan Institut Hindu Dharma (IHD). Sebelumnya,



jumlah mahasiswa yang belajar sastra dan bahasa Bali sangat kecil, pernah di bawah sepuluh orang. Belakangan, peminatnya banyak sekali. Mereka berharap setelah kuliah bisa menjadi guru bahasa dan sastra Bali.

Buku karya sastra Bali modern mendapat banyak perhatian dari mahasiswa, misalnya sebagai bahan analisis untuk menulis skripsi. Perkembangan lainnya, mahasiswa program pascasarjana juga mulai banyak, termasuk yang memilih dan menjadikan sastra Bali modern sebagai objek penelitian. Apresiasi dan analisis atas karya ini membuat penulis buku sastra Bali merasa diperhatikan. Mereka merasa ada gunanya menulis dan akhirnya terus menulis sesuai dengan laju kreativitas masing-masing. Kian banyak buku yang menjadi korpus sastra Bali modern, yang menjadi *body of knowledge* tentang apa pun yang diungkapkan, terutama ihwal perubahan sosial budaya dan politik di Bali.

Semangat mempelajari sastra Bali kini dibayang-bayangi oleh kabut Kurikulum 2013 yang menghapuskan pelajaran bahasa daerah. Dalam kurikulum baru, pelajaran bahasa daerah digabungkan ke dalam mata pelajaran budaya lokal, termasuk di dalamnya kesenian dan keterampilan. Dampak kebijakan kurikulum itu mengurangi peluang untuk menjadi guru bahasa daerah. Aliansi Peduli Bahasa Bali yang dimotori mahasiswa dan sarjana bahasa Bali serta didukung beberapa lembaga perguruan tinggi berusaha memperjuangkan pengajaran dan pembinaan bahasa Bali. Mereka melakukannya dengan berbagai unjuk rasa, mulai dari penolakan Kurikulum 2013, mendorong pemerintah untuk membina bahasa Bali, serta memperhatikan sarjana dan guru bahasa Bali. Mereka juga datang ke DPR Pusat untuk maksud yang sama (Ardiyasa, 2012; Fox, 2012).

Perjuangan Aliansi Peduli Bahasa Bali akhirnya membuahkan dua hal yang saling berkaitan. *Pertama*, pemerintah menunjukkan kebijakannya untuk membina bahasa Bali di luar sekolah. *Kedua*, pemerintah provinsi mengangkat sarjana bahasa Bali sebagai penyuluh bahasa untuk melakukan pembinaan. Pada tahun 2016, untuk pertama kalinya, Pemprov Bali menyeleksi dan mengangkat 716 penyuluh bahasa Bali. Di setiap desa (dinas) akan ditempatkan satu orang penyuluh. Mereka digaji seperti pegawai kontrak. Dalam perjalanan waktu, ada beberapa penyuluh yang mundur, tetapi Pemprov Bali menyeleksi lagi untuk mengangkat pengganti. Para penyuluh bertugas untuk membina bahasa Bali di wilayah kerja masing-masing.

Selain membina bahasa Bali, mereka juga mendata koleksi lontar, menulis cerita rakyat, dan membuat buku antologi puisi berbahasa Bali. Antologi puisi itu berjudul *Campuhan Rasa (Pertemuan Rasa)*, berisi 713 judul puisi karya dari 651 penyuluh bahasa dibuatkan dami dalam dua jilid. Setiap penyuluh mendapat dua jilid *dummy*. *Dummy* tersebut diteruskan kepada dinas pendidikan/kebudayaan di kabupaten/kota dan diharapkan untuk dicetak dengan anggaran masing-masing. Para penyuluh bahasa juga telah mengumpulkan cerita rakyat dari desa-desa tempat mereka bertugas. Namun, proses penerbitannya menanti anggaran dari Dinas Kebudayaan Bali. Kehadiran antologi puisi dan naskah cerita rakyat Bali tersebut ikut memperkaya khazanah sastra Bali modern.

Kegairahan mencipta dan memublikasikan sastra Bali modern tidak bisa dilepaskan dari semangat kecintaan terhadap bahasa dan sastra Bali yang tumbuh dari dalam dan motivasi dari Hadiah Sastra Rancage. Setelah dua puluh tahun diikutkan sebagai penerima Hadiah Sastra Rancage, sudah ada hampir lima puluh penulis/pembina sastra Bali modern yang meraih hadiah sastra Rancage, baik atas buku yang ditulisnya maupun atas jasanya dalam pengembangan bahasa dan sastra



Bali (lihat lampiran). Mereka dan karya-karya yang diciptakan adalah tulang-punggung kehidupan sastra Bali modern.

### **Karya, Kecenderungan Tematik, dan Penulis**

Terlepas dari masa kesenjangan-kesenjangan yang sambung-sinambung, dalam rentang waktu seratus tahun, sudah cukup banyak karya sastra Bali modern yang terbit. Karya-karya tersebut sudah membentuk korpus karya yang tidak saja membuat sosok sastra Bali modern kian jelas dan kuat, tetapi juga merupakan teks pengetahuan dan kearifan lokal. Pendek kata, sastra Bali modern merupakan warisan budaya (*cultural heritage*).

Jika dilihat dari bentuknya, kebanyakan sastra yang hadir adalah jenis puisi dan cerita pendek, sedangkan novel relatif sedikit dan naskah drama lebih sedikit sekali. Komposisi ini mungkin bersifat universal karena di berbagai sastra di dunia, puisi dan cerita pendek memang lebih cepat dipublikasikan daripada jenis sastra lainnya sehingga jumlahnya lebih banyak.

Ketika sastra Bali modern pertama hadir pada tahun 1910-an, bentuk yang muncul adalah cerita pendek. Pada tahun 1913, I Made Pasek menerbitkan buku berjudul *Tjatoer Perenidanâ, Tjakepan Kaping Doeâ Pâpeladjahan sang Mâmanah Maoeroek Mâmaos Aksarâ Belanda* (*Catur Perenidana, buku pelajaran kedua bagi peminat belajar bahasa aksara Belanda*), yang berisi 46 karangan, termasuk jenis eksposisi dan narasi. Cerita pendek yang muncul dalam buku ini berjudul “Balian” (Dukun), sangat pendek dan bisa dianggap cikal-bakal cerpen bahasa Bali modern. Pasek juga menerbitkan buku *Aneka Roepa Kitab Batjaan* (1916). Buku ini ditulis dengan huruf Latin, berisi 33 judul, sebagian besar merupakan tulisan naratif berbentuk cerita pendek, yang struktur dan alurnya lebih mantap dari cerita sebelumnya. Salah satu cerpen menarik dalam buku ini berjudul “Pemadat”, yang mengisahkan orang yang hidupnya berantakan (sampai mencuri sapi) karena kecanduan narkoba zaman itu. Dalam buku lain, Pasek juga menulis cerita tentang orang yang suka minum minuman keras, seperti brandy dan jenever, yang mengakibatkan mereka mabuk dan meninggal.

Selain Pasek, Mas Nitisastro, seorang guru dari Jawa yang bertugas di Singaraja juga menerbitkan buku yang berisi cerpen, seperti buku *Warna Sari, Batjaan Bali Hoeroef Belanda* (1925), ditulis dalam huruf Latin (bukan huruf Belanda), digunakan untuk kelas III di Bali. Salah satu cerpen Nitisastro adalah “Anak Rihih” (Orang Cerdik). Berbeda dengan cerita Made Pasek soal narkoba dan minum keras, cerita ini bernada jenaka. Meski berbeda, tema-tema cerita Pasek dan Nitisastro sama-sama aktual dengan situasi saat itu atau memberikan nasihat dan hiburan yang cocok untuk anak-anak sekolah.

Kecenderungan tematik karya sastra Bali modern bisa dikategorikan ke dalam tiga tema utama, yaitu identitas Bali, hukum karma dan sistem kepercayaan, serta perubahan sosial akibat dampak pariwisata. Kadang, satu karya bisa tampil memadukan seluruh tema tersebut.

Masalah identitas muncul dalam berbagai karya, seperti puisi, cerpen, dan novel. Dalam novel *Nemu Karma* yang terbit pada tahun 1931, masalah identitas muncul dalam pergantian nama tokoh-tokohnya sehingga mereka tidak mengetahui bahwa mereka bersaudara. Dalam novel *Mlantjaran ka Sasak* karya Gde Srawana, masalah identitas yang muncul adalah masalah kasta, yang menghalangi dua remaja berbeda kasta saling jatuh cinta untuk melanjutkan rasa cintanya. Soal identitas juga



menjadi salah satu tema dalam cerpen *Ketemu ring Tampaksiring* karya Made Sanggra, yang mengisahkan kisah cinta wartawan Belanda dengan penjaga *artshop* di Tampaksiring. Belakangan, terungkap bahwa sesungguhnya sang wartawan dan penjaga *artshop* itu adalah saudara kandung dari ayah tentara Belanda dan ibu orang Bali. Mereka bercerai karena kemerdekaan. Tentara Belanda pulang ke negerinya membawa anaknya yang kelak menjadi wartawan. Dia meninggalkan istrinya yang hamil, yang kemudian melahirkan penjaga *artshop*. Terungkapnya identitas membuat niat cinta antara kakak-adik terhindarkan.

Identitas kebalian juga muncul dalam beberapa karya yang umumnya berlatar belakang perkembangan kepariwisataan. Cerpen-cerpen yang terkumpul dalam antologi *Mekel Paris* (2012) karya IBW Keniten. Karya ini berisi 12 cerpen yang semuanya menyajikan interaksi antara orang Bali dan orang Barat, seperti orang Belanda, Prancis, Selandia Baru, dan Jepang (Septiawan, 2014). Interaksi itu terjadi karena berbagai faktor, tetapi pada dasarnya hendak menyampaikan pesan betapa pentingnya orang Bali menjaga identitas sebagai orang Bali melalui pelestarian budaya dan mencegah pengaruh negatif dari orang asing. Tampaknya tema identitas akan terus menjadi kecenderungan dalam karya sastra Bali modern, baik dalam konteks identitas sebagai orang Bali dengan melawankan diri dengan orang lain (*the other*) maupun identitas dalam konteks internal Bali, seperti berlaku dalam konteks sistem kasta atau warna.

Tema yang berhubungan dengan hukum karma atau sistem kepercayaan juga menjadi salah satu kecenderungan utama dalam karya sastra Bali modern. Salah satu cerpen Made Pasek berjudul “Keneh Jujur dadi Mujur” adalah contoh cerita bertema hukum karma. Cerpen ini mengisahkan tokoh yang berbuat jujur akhirnya beruntung. Kisahnya adalah seorang penggali tanah yang menemukan harta karun. Dia minta petunjuk kepada hakim siapa yang berhak atas harta karun itu, apakah yang menggali atau yang memiliki tanah? Sang hakim memberikan putusan bahwa harta karun itu dibagi dua, satu untuk anak penggali dan satu bagian lagi untuk anak pemilik tanah. Keduanya merasa senang dan merasa mendapat kemujuran untuk keluarga masing-masing. Dalam novel *Mlantjaran ka Sasak*, aspek hukum karma terlihat ketika tokoh laki-laki dalam novel itu menyelamatkan tokoh perempuan dari kecelakaan. Utang budinya dibalas dengan berbagai kebaikan, yang bagi tokoh laki-laki itu menandakan bahwa hukum karma baik bagi yang berbuat baik dan bekerja dengan efektif.

Sistem kepercayaan akan leak (*black magic*) juga sangat kental dalam sastra Bali Modern, seperti bisa dibaca dalam antologi cerpen *Leak Pemoroan* (2010) karya I Wayan Sadha. Leak dipercaya sebagai kekuatan ilmu hitam yang dapat menyihir dan menyakiti. Kepercayaan tradisional ini masih mewarnai sistem kepercayaan masyarakat Bali pada zaman modern, seperti tersimak dalam cerpen “Jaen Idup di Bali” (2016) yang melukiskan secara ironis bahwa hidup di Bali memang enak kalau bisa bebas dari serangan iri hati dan *black magic*. Tema leak atau *black magic* juga muncul berulang dalam karya sastra Indonesia yang ditulis pengarang Bali (dalam arti yang berdomisili di Bali), seperti novel populer, *Leak Ngakak* (1978) karya Putra Mada yang diangkat menjadi film berjudul sama *Leak Ngakak* (1981) dan kumpulan cerpen *Leak* karya Faisal Baraas (1983). Salah satu sumber cerita leak adalah kisah klasik *Calonarang* yang terus mewarnai kepercayaan masyarakat Bali dan memberikan inspirasi bagi sastrawan untuk berkreasi, termasuk sastrawan Bali modern.



Tema terakhir yang muncul berulang dalam sastra Bali modern adalah perubahan sosial akibat pariwisata. Novel *Sayong* (Kabut, 1999), karya Nyoman Manda mengisahkan kesulitan masyarakat mempertahankan sawah atau tanahnya dari incaran investor untuk pembangunan pariwisata. Novel ini mengartikulasikan kekhawatiran. Kekhawatiran yang sama juga terungkap dalam antologi cerpen *Ngurug Pasih* (2014) karya I Gedé Putra Ariawan. Antologi cerpen yang meraih Hadiah Sastra Rancage tahun 2015 ini mengungkapkan penolakan masyarakat Bali terhadap proyek reklamasi Teluk Benua yang hendak dijadikan area pembangunan daya tarik atau fasilitas pariwisata.

Kekhawatiran sosial terhadap tercerabutnya akar budaya Bali akibat pariwisata tecermin dalam cerita-cerita dalam antologi cerpen *Mekel Paris. Metek Bintang* (2012) karya Komang Adnyana. Cerpen-cerpen dalam antologi ini secara terbalik mengajak masyarakat Bali untuk melestarikan budaya Bali walaupun terjangan pengaruh pariwisata sangat kuat.

Ramainya geliat sastra Bali modern juga ditandai dengan hadirnya banyak penulis, baik laki maupun perempuan, baik yang sudah senior maupun yang baru mulai. Penulis sastra Bali modern dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu sastrawan berlatar belakang guru dan sastrawan berlatar belakang wartawan. Karya sastra Bali modern awal ditulis oleh para guru, seperti I Made Pasek, Mas Nitisastro, Wayan Gobiah, dan Gde Srawana. Penulis dari era sesudah kemerdekaan yang berprofesi sebagai guru/dosen/pendidik juga banyak, seperti I Nyoman Manda, Tusthi Eddy, I Ketut Rida, IGP Bawa Samargantang, I Made Suarsa, Putu Gde Suata, IDK Raka Kusuma, Nyoman Adiputra, IBW Keniten, IDG Windhu Sancaya, Gde Nala Antara, Komang Adnyana, Putra Ariawan, dan Dewa Ayu Carmawati. Sebagian merupakan guru yang mengajarkan sastra secara umum dan yang lainnya mengajarkan bahasa dan sastra Bali.

Kelompok kedua adalah pengarang berlatar belakang wartawan. Pengarang yang termasuk dalam kelompok ini adalah I Made Suarsa (*Sinar Harapan/Suara Pembaruan*), I Made Sugianto (*Harian Nusa*), Mas Ruscitadewi (*Bali Post*), Ni Madé Ari Dwijayanthi (*Pos Bali*), dan Putu Supartika (*Tribun Bali*). Profesi tulis-menulis berita dan dekat dengan berbagai isu sosial di masyarakat membuat wartawan dekat dengan dunia sastra. Selain sebagai pengarang, mereka juga memberikan kontribusi dalam pembuatan berita sastra di media tempat mereka bekerja.

### **Peran Sastra Bali Modern dalam Kehidupan Sosial Budaya Bali**

Peran sastra Bali Modern dalam kehidupan sosial budaya bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu di bidang pendidikan, kesenian, dan wacana sosial. Indikator kualitatif dapat diberikan untuk membuktikan peran, kontribusi, atau fungsi sastra dalam kehidupan sosial.

*Pertama*, peran sastra di bidang pendidikan bisa dilihat dari kegunaan buku sastra dalam dunia pendidikan, baik formal di sekolah maupun nonformal di masyarakat. Buku cerita karya Made Pasek dan Mas Nitisastro yang digunakan sebagai buku teks di sekolah dasar adalah bukti nyata sumbangan sastra dalam dunia pendidikan dan pembentukan karakter siswa. Peran ini terus berlanjut di berbagai jenjang pendidikan, seperti di perguruan tinggi, karya sastra Bali modern telah menjadi bahan kuliah dan objek kajian yang menghasilkan berbagai pengetahuan kearifan lokal.



*Kedua*, peran sastra Bali modern di bidang seni budaya Bali jelas terlihat dalam heterogenitas lanskap sastra di Bali. Bali tidak saja memiliki seni pertunjukan, seni rupa, dan seni tari, tetapi juga seni sastra Bali. Dalam bidang seni pertunjukan, karya sastra Bali modern memberikan inspirasi dalam penciptaan seni pertunjukan arja (opera), yaitu cerpen *Ketemu ring Tampaksiring* (2003 [1972]) karya I Made Sanggra. Lazimnya, cerita seni pertunjukan Bali diambil dari cerita Panji, Ramayana, atau Mahabarata. Akademisi dan seniman berbakat, I Wayan Dibia mengangkat cerpen *Ketemu Ring Tampaksiring* menjadi arja tahun 2006 dan dipentaskan beberapa kali, termasuk di Pesta Kesenian Bali. Memang belum ada karya sastra Bali modern lain yang diangkat sebagai lakon seni pertunjukan. Meskipun demikian, sumbangan kecil ini tetap pantas dicatat.

*Ketiga*, sastra Bali modern berperan dalam mengartikulasikan kepedulian sosial lewat karya seni. Sebagai contoh adalah novel *Sayong* dan cerpen *Helikopter* karya Nyoman Manda yang mengangkat masalah penjualan tanah Bali untuk memenuhi bujukan investor dalam pembangunan usaha pariwisata. Antologi cerpen *Ngurug Pasih* karya Putra Ariawan muncul dalam suasana semaraknya isu penolakan megaproyek reklamasi di Teluk Benoa. Isu penolakan reklamasi membuat wacana dampak negatif kepariwisataan dalam alihfungsi lahan dari pertanian menjadi properti perhotelan makin santer. Kemampuan sastra Bali modern dalam menjangkau pembaca memang relatif kecil. Meskipun demikian, perannya sebagai artikulasi kepedulian sosial tetap berguna dilihat dari kehadirannya sebagai dokumen sosial yang bisa dibaca kapan saja.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam seratus tahun terakhir, kehidupan sastra Bali modern berkembang dari kondisi penuh kesenjangan, kekosongan, menuju ke arah makin semarak. Perkembangan awal pada zaman kolonial (1910-an) sampai zaman kemerdekaan hingga tahun 1980-an, kesenjangan demi kesenjangan mewarnai kehidupan sastra Bali modern. Berbagai usaha ditempuh untuk mengatasi kesenjangan itu, seperti lewat sayembara, penerbitan, dan publikasi di media massa. Namun, tetap saja banyak muncul komentar negatif bahwa sastra Bali modern akan segera mati. Tanpa meremehkan peringatan tersebut, perlu juga diapresiasi secara objektif bahwa sesungguhnya berbagai usaha yang ditempuh mampu mempertahankan napas hidup sastra Bali modern sehingga usaha menyemarakkannya tidak memerlukan langkah dari awal.

Perkembangan sastra Bali modern mulai menggeliat dan makin ramai pada akhir 1990-an, ketika sastra Bali modern dimasukkan sebagai penerima Hadiah Sastra Rancage. Karya sastra Bali bersanding dengan sastra daerah lainnya, seperti sastra Sunda, Jawa, dan Batak. Sejak itu, jumlah buku sastra Bali modern yang terbit setiap tahun cukup membanggakan, rata-rata 8--10 judul. Walaupun angka ini relatif kecil, keberadaannya patut dicatat karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Yayasan Kebudayaan Rancage pimpinan sastrawan, Ajip Rosidi memainkan peranan penting dalam menyemarakkan kehidupan sastra Bali modern. Sulit membayangkan stigma sastra Bali modern 'bagaikan kerakap tumbuh di batu' seandainya tidak ada pemberian hadiah sastra Rancage.

Dalam seratus tahun ke depan, kehidupan sastra Bali modern diperkirakan akan tetap stabil karena dasarnya sudah kuat dalam tiga dekade terakhir. Faktor eksternal yang mendukung juga positif, seperti gairah pelestarian dan pengembangan bahasa



Bali dan juga teknologi produksi dan distribusi buku (secara digital) yang lebih mudah. Namun, berdasarkan pengalaman yang ada, optimisme akan masa depan yang cerah bagi sastra Bali modern akan lebih pasti terwujud kalau motivasi berupa pemberian hadiah sastra seperti Rancage tetap dapat diteruskan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agastia, I.B.G. (1994). *Kesusastraan Hindu Indonesia (Sebuah Pengantar)*. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
- Ardiyasa, I N.S. (2012). “Catatan Perjuangan Bahasa Bali dalam Kurikulum 2013”, *Jurnal Kajian Bali*.
- Bagus, I G.N. (2002). “Tantangan, Potensi, Serta Peluang Bahasa Bali di tengah Peradaban Globalisasi”, in Ida Bagus Darmasuta et al (ed.), *Kumpulan Makalah Kongres Bahasa Bali V*. Denpasar: Balai Bahasa Denpasar.
- Bagus, I G.N. (1996). ‘The Play Women’s Fidelity’: Literature and Caste Conflict in Bali’, *Being Modern in Bali, Image and Change*. disunting Adrian Vickers. Monograph 43/Yale Southeast Asia Studies.
- Bagus, I G.N. dan I K. Ginarsa. (1978). *Kembang Rampe Kasusastraan Bali*. Singaraja: Balai Penelitian Bahasa.
- Baraas, F. (1983). *Leak*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Creese, H. (2009). ‘Singing the text: on-air textual interpretation in Bali. In J. van der Putten and M.K. Cody (eds.), *Lost Times and Untold Tales From the Malay World*. Singapore: NUS Press.
- Creese, H. (1999). “The Balinese Kakawin Tradition, A Preliminary Description and Inventory”, *Bidjragen*.
- Eddy, N.T. (1991). *Mengenal Sastra Bali Modern*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fox, R. (2012). “Ngelidin Sétra, Nepukin Sema? Thoughts on Language and Writing in Contemporary Bali”, *Jurnal Kajian Bali*.
- Jendra, I W. (1976), ‘Sekilas tentang Puisi Sastra Bali Modern’, *Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa
- Kagami, H. (2010). “Pemakaian Bahasa Nasional/Daerah di Kalangan Remaja: Sebuah Studi Kasus dari Bali”, in Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman (eds) *Geliat Bahasa Selaras Zaman*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Manda, I N. (1999). *Sayong* (novel). Gianyar: Pondok Tebawutu.
- Nitisastro, Mas. (1925). *Warna Sari. Tjakepan Bali Sastera Belanda*. Weltevreden: Landsdrukkerij.
- Pasek, I M. (1913). *Tjatoer Perenidana*. Semarang: Drukkerij en Boekhandel.
- Pasek, I M. (1918). *Aneka Warna Peratamaning Tjakepan, Pepaosan Bali Kesoerat Antoeke* (sic) *Ksara Belanda*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Pasek, I M. (1918). *Aneka-warna Tjakepan Kaping Kalih, Pepaosan Bali Kesoerat Antoeke Aksara Belanda*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Putra, I N.D. (2012). “Novel ‘Tantri’, Daur Ulang Nilai-Nilai Untuk Pembentukan Karakter Bangsa”, *Jurnal Kajian Bali*.
- Putra, I N.D. (2001). *A Literary Mirror; Balinese Reflections on Modernity and Identity in The Twentieth Century*. Leiden: KITLV.
- Putra, I N.D. (2009). ‘Kidung interaktif’: vocalising and interpreting traditional literature through electronic mass media in Bali. *Indonesia and the Malay World* 37.





- Putra, I N.D. (2008). “Modern Performing Arts as a Reflection of Changing Balinese Identity”, *Indonesia and the Malay World*,
- Putra, I N.D. (2010). *Tonggak Baru Sastra Bali Modern*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Putra, I N.D. (2011). Mungkinkah Menganggap Akhir Abad ke-20 Sastra Bali Memasuki Sebuah Era Keemasan?, *Jurnal Kajian Bali*.
- Etti R.S. dkk. (eds). (2013). *Seperempat Abad Hadiah Sastra Rancage*. Bandung: Yayasan Kebudayaan Rancage.
- Sanggra, I M. (1997). *Kidung Republik*. Denpasar: Buku Arti.
- Sanggra, I M. (2003). *Ketemu ring Tampaksiring*. Denpasar: Buku Arti.
- Septiawan, I W.E. (2014). Bule Belajar Budaya Bali: Kritik Identitas dalam Antologi Cerpen “Mekel Paris”, *Jurnal Kajian Bali*.
- Setia, P. (1987). *Menggugat Bali*. Jakarta: Grafiti.
- Vickers, A. (2005). *Journeys of Desire, A Study of the Balinese Text Malat*. Leiden: KITLV Press.
- Zoete, B. de and W. Spies. (1938). *Dance and drama in Bali*. New York: Thomas Yoseloff.

#### Lampiran Daftar Peraih Rancage untuk Sastra Bali 1998--2018

No	Tahun	Buku terbaik/ karya pengarang	Tokoh berjasa
1.	2018	<i>Bulan Sisi Kauh</i> (Bulan di Sisi Barat), prosa liris I Gede Agus Darma Putra.	Tidak ada, kategori ini dihapuskan.
2.	2017	<i>Kutang Sayang Gemel Madui</i> (Dibuang Sayang Dipegang Berduri) kumpulan cerpen Dewa Ayu Carma Citrawati.	<b>I Putu Supartika</b> , penulis cerpen dan pengelola jurnal <i>Suara Saking Bali</i> (Suara dari Bali).
3.	2016	<i>Swecan Widhi</i> kumpulan cerpen karya I Komang Alit Juliartha	<b>I Gede Gita Purnama Arsa Putra</b> , penulis kritik sastra dan aktif di Aliansi Peduli Bahasa Bali.
4.	2015	<i>Ngurug Pasih</i> , kumpulan cerita pendek karya I Gedé Putra Ariawan	<b>I Nyoman Adiputra</b> , pengarang sejumlah kakawin antara lain “Kakawin Udayana Mahawidya” (Kakawin Universitas Udayana sebagai Sumber Pengetahuan, 1993) dan “Kakawin Bali Sabho Lango” (Pesta Kesenian Bali).
5.	2014	<i>Tutur Bali</i> , Buku cerita karya I Wayan Westa	<b>Prof. Dr. I Gusti Made Sutjaja</b> , penyusun kamus Bahasa Bali termasuk Bali-Indonesia-Inggris.
6.	2013	<i>Sentana</i> (Anak), novel I Made Sugianto.	<b>I Nyoman Suprapta</b> (pengubah <i>geguritan</i> ; pembina kelompok tembang tradisional)
7.	2012	<i>Metèk Bintang</i> (Menghitung Bintang), buku cerpen Komang Adnyana.	<b>I Made Sugianto</b> (penerbit buku sastra Bali modern)
8.	2011	<i>Sang Lelana</i> , kumpulan sajak IDK Raka Kusuma	<i>Bali Orti</i> , Sisipan bahasa Bali <i>Bali Post Minggu</i>
9.	2010	<i>Leak Pemoroan</i> (Lèak Pemoroan), buku cerpen I Wayan Sadha.	<b>Agung Wiyat S. Ardhi</b> (sastrawan, pembina bahasa dan sastra tradisional Bali)



No	Tahun	Buku terbaik/ karya pengarang	Tokoh berjasa
10	2009	<i>Somah</i> (Istri/Suami), buku puisi I Nyoman Tusthi Eddy.	<b>I Nengah Tinggen</b> (penulis cerita berbahasa Bali, pengisi program bahasa Bali RRI Singaraja)
11	2008	<i>Depang Tiang Bajang Kayang-kayang</i> (Biarkan saya Lajang Selamanya) novel I Nyoman Manda.	<b>I Made Suatjana</b> (penemu Bali Simbar, yaitu aksara Bali dalam aplikasi computer).
12	2007	<i>Gede Ombak Gede Angin</i> (Besar Ombak, Besar Angin), buku cerpen I Made Suarsa.	<b>Ida Bagus Dharmasuta</b> (Kepala Balai Bahasa Denpasar, pembantu penerbitan sejumlah buku dan majalah sastra Bali)
13	2006	<i>Buduh Nglawang</i> (Orang Gila Menarinar) buku cerpen karya Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten.	<b>Drs. Ida Bagus Gde Agastia</b> (penyair, kritikus sastra Bali tradisional dan modern).
14	2005	<i>Ang Ah lan Ah Ang</i> , kumpulan puisi I Made Suarsa.	<b>Drs. Made Taro</b> (penyair sastra Bali modern dan penulis buku dongeng Bali)
15	2004	<i>Coffee Shop</i> (Warung Kopi), buku puisi I Dewa Gde Windhu Sancaya.	<b>Nyoman Tusthi Eddy</b> (penyair dan kritikus untuk sastra Bali).
16	2003	<i>Bunga Gadung Ulung Abancang</i> (Bunga Gadung Gugur Setangkai), novel I Nyoman Manda.	<b>I Gusti Putu Bawa Samar Gantang</b> (penyair dan penulis cerpen bahasa Bali, guru).
17	2002	<i>Semalun Rinjani</i> (Semalun Rinjani), novel Djelantik Santha.	<b>IDK Raka Kusuma</b> (penyair, cerpenis, dan pengelola majalah bahasa dan sastra Bali, <i>Buratwangi</i> ).
18	2001	<i>Gending Girang Sisi Pakerisan</i> (Nyanyian Riang di Tepi Kali Pakerisan), buku sajak dan naskah drama gong Agung Wiyat A. Ardhi.	<b>I Ketut Suwija</b> (penyair, penulis dan penerjemah sastra tradisional Bali).
19	2000	<i>Sunari</i> (Sunari), novel I Ketut Rida.	<b>I Gde Dharna</b> (penyair, penulis naskah drama berbahasa Bali, pencipta lagu Bali).
20	1999	<i>Lekad Tumpek Wayang</i> (Lahir pada Hari Tumpak Wayang), kumpulan cerpen I Komang Berata.	Prof. Dr. <b>I Gusti Ngurah Bagus</b> (pembina, penerbit buku-buku sastra Bali).
21	1998	<i>Kidung Republik</i> (Kidung Republik), buku puisi I Madé Sanggra.	<b>I Nyoman Manda</b> (sastrawan Bali modern, pengelola majalah sastra Bali <i>Canang Sari</i> ).



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : I Nyoman Darma Putra  
Judul Makalah : “Makin Ramai Berkat Rancage: Seratus Tahun Perkembangan Sastra Bali Modern”  
Hari, tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 10.15—11.45  
Moderator : Dr. Syarifuddin, M.Hum.  
Pencatat : 1. Elvi Suzanti  
2. Inayatsshalihah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Sastra di Bali heterogen. Sastra Bali tradisional menggunakan bahasa Bali kuno, sastra Indonesia modern, dan sastra Bali modern. Oleh karena itu, sering terjadi intertekstualitas antarkategori jenis sastra itu.
2. Sejak kelahirannya, sastra Bali modern menjadi bagian dari pendidikan sekolah modern Belanda. Sastra Bali modern digunakan sebagai wahana untuk memperkenalkan gagasan baru, modernisasi, dan reinterpretasi tradisi.
3. Pada awalnya, sastra Bali hanya sayup-sayup. Berkat Hadiah Sastra Rancage, geliat sastra Bali semakin marak.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : S.R.H. Sitanggang

**Pertanyaan:**

Ada sastra Indonesia yang rohnya daerah, demikian pula sebaliknya. Apakah makna roh sastra modern yang pembicara sampaikan? Berapa banyak konten budaya daerah dalam sastra modern Bali?

**Jawaban:**

Roh sastra terletak pada isi. Akan tetapi, isi itu tidak akan pernah dapat ditangkap jika tidak ada medianya. Roh sastra Bali terletak pada bahasa dan isinya. Bahasa sastra Bali yang dibuat oleh anak muda dewasa ini lebih “membalikan” bahasa Indonesia (menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Bali).

**Penanya 2**

Nama : Syahrudin

Instansi : Universitas Maros

**Pertanyaan:**

Apa perbedaan antara sastra Bali modern dan sastra Bali tradisional? Apa yang menjadi ciri pembeda kedua jenis sastra itu?



**Jawaban:**

Istilah tradisional dan modern membantu kita membedakan hal yang rumit karena pada dasarnya sastra itu sama. Namun, keduanya dibedakan dalam pandangan positivistik. Sastra tradisional, seperti geguritan, kakawin, babad, sedangkan modern, seperti puisi, novel, dan drama.



## 8. Numeral Classifier Bahasa Minangkabau Isolek Aia Bangih *NUMERAL CLASSIFIER BAHASA MINANGKABAU ISOLEK AIA BANGIH*

Sri Wahyuni, Nadra, dan Ria Febrina  
Universitas Andalas  
eny.azwar@gmail.com

### Abstrak

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang dilakukan melalui pendanaan dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Dikti tahun 2018. Penelitian ini berlokasi di di Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat. Tujuan pembahasan ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk *numeral classifier* dan penggunaannya oleh penutur bahasa Minangkabau isolek Aia Bangih. Data diperoleh dengan cara menemui informan secara langsung di lapangan. Penyediaan data dilakukan melalui penyimakan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam jenis-jenis *numeral classifier* yang dikemukakan oleh Mizuguchi (2004). Berdasarkan hasil analisis data, terdapat tiga jenis *numeral classifier* bahasa Minangkabau isolek Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat, yaitu *numeral classifier individual*, *numeral classifier kolektif*, dan *numeral classifier ukuran*. *Numeral classifier individual* yang digunakan oleh masyarakat adalah *urang, ikua, buah, bijo, ole, batang, bontuak, unte, tungkua, papan, dan pucuak*. *Numeral classifier kolektif* yang digunakan masyarakat ialah *rumpun, punduk (tanjua), tangke, gagang, kobek, joghek, sikek, tandan, palopa, unguak, bungkuh, pak, susun, iyik, kapua, lapiak, pasang, dan patogak*. Selanjutnya, *numeral classifier ukuran* yang digunakan masyarakat adalah *ghimpang, kalipak, ghicia, saik, uwang, uweh, bolah, kuduang, kopiang dan suntiah, kodi, usin, titiak, bingkah, dan kopa, suok, pipiah, ghoguak, gotok, cibik, kawuk, gonggam, liter, taka, sukek, kulak, kubik dan belet, jongka, eto, dopo, meter, yar, bal, kilo, gaghah, kilo, gram, omeh, bunci, ompu, pantak, kayu, dan goma*.

**Kata-kata kunci:** *numeral classifier*, bahasa Minangkabau, isolek Air Bangis

### Abstract

*This article is part of the research result conducted through the funding from the Directorate General of Research and Development, Ministry of Research, Technology, and Higher Education in 2018. The research location was in Nagari Aia Bangih, Sungai Beremas District, West Pasaman District, West Sumatra Province. This study was carried to describe the forms of the numeral classifier and its use by the Minangkabau speakers of the Aia Bangih isolect. The data was collected by meeting the informants directly in the location. The provision of data is performed through hearing and interviewing. Meanwhile, the data were analyzed by grouping the obtained data into the types of numeral classifier proposed by Mizuguchi (2004). Based on the results of data analysis, there are three types of numeral classifier of the Minangkabau language of the isolate of Air Bangis of Pasaman Barat Regency, namely the individual, the collective, and the size numeral classifier. The individual numeral classifiers used by the community included*



urang, ikua, buah, bijo, ole, batang, bontuak, unte, tungkua, papan and pucuak. The collective numeral classifiers used by the community were rumpun, punduk (tanjua), tangke, gagang, kobek, joghek, sikek, tandan, palopa, unguak, bungkuh, pak, susun, iyik, kapua, lapiak, pasang, and patogak. Furthermore, the size numeral classifiers used by the community were ghimpang, kalipak, ghicia, saik, uwang, uweh, bolah, kuduang, kopiang dan suntiah, kodi, usin, titiak, bingkah, dan kopa, suok, pipiah, ghoguak, gotok, cibik, kawuk, gonggam, liter, taka, sukek, kulak, kubik dan belet, jongka, eto, dopo, meter, yar, bal, kilogaghah, kilo, gram, omeh, bunci, ompu, pantak, kayu, and goma.

**Keywords:** numeral classifier, Minangkabau language, isolect of Aia Bangih

## PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang dilakukan melalui pendanaan dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Dikti tahun 2018. Salah satu daerah penelitian yang dijadikan tempat pengambilan data adalah Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat. Nagari Aia Bangih merupakan nagari yang sekaligus menjadi ibu kota kecamatan.

Dari penelitian yang dilakukan di Nagari Aia Bangih diperoleh data bahwa masyarakat Aia Bangih masih menggunakan bahasa Minangkabau untuk berkomunikasi, baik sesama masyarakat Minangkabau, maupun dengan masyarakat pendatang yang berasal dari daerah lain di Minangkabau. Meskipun demikian, kemungkinan punahnya sejumlah kosakata bahasa Minangkabau di sini tetap ada. Beberapa kosakata ada yang telah bersifat arkais karena tidak lagi digunakan oleh masyarakat Minangkabau di Nagari Aia Bangih dan digantikan dengan kosakata bahasa Minangkabau umum.

Sebelum kondisi ini semakin mengkhawatirkan, perlu dilakukan pendokumentasian terhadap bahasa Minangkabau di daerah ini. Bahkan, pada umumnya, masyarakat Minangkabau memiliki kebiasaan merantau. Kebiasaan merantau justru menyebabkan masyarakat Minangkabau memilih menggunakan dialek umum dan menghindari penggunaan dialek khas daerah masing-masing.

Untuk mempertahankan penggunaan bahasa Minangkabau di Kabupaten Pasaman Barat, perlu dilakukan pendokumentasian terlebih dahulu sehingga ke depannya dapat dilakukan revitalisasi bahasa untuk generasi penerus. Dalam penelitian ini digali aspek kosakata bahasa Minangkabau, khususnya kosakata yang berupa *numeral classifier*.

Beberapa bahasa di dunia pun memiliki *numeral classifier*. Aikhenvald (2000) menyatakan bahwa bahasa-bahasa yang memiliki *numeral classifier* terbentang luas, mulai dari Tiongkok sampai dengan sebagian India, Benua Amerika, dan Amerika Selatan bagian tengah. Oleh karena itu, sejumlah peneliti dunia telah melakukan penelitian yang berhubungan dengan *numeral classifier*.

Pada tahun 1984, Pamela melakukan penelitian tentang *numeral classifier* bahasa Jepang. Lalu, pada tahun 1986, sejumlah peneliti juga melakukan penelitian mengenai *numeral classifier* di beberapa bahasa, seperti Adam (1986) meneliti *numeral classifier* dalam rumpun bahasa Austroasia; Becker (1986) meneliti *numeral classifier* bahasa Birma; dan Hopper (1986) meneliti *numeral classifier* bahasa Melayu. Selanjutnya, Zhang (2007) meneliti *numeral classifier* bahasa Mandarin; Eieiko (2004) meneliti *numeral classifier* bahasa Birma; Kiryuu (2004)



meneliti *numeral classifier* bahasa Newar; Salehuddin dan Heather Winskel (2011 dan 2012) meneliti *numeral classifier* bahasa Melayu; Wahyuni (2006, dan 2015) meneliti *numeral classifier* bahasa Indonesia; dan Nadra, Sri Wahyuni, dan Mahsun (2014) serta Nadra dan Sri Wahyuni (2015) meneliti *numeral classifier* bahasa Indonesia.

Tidak hanya itu, penelitian mengenai *numeral classifier* bahasa Jepang juga gencar dilakukan, di antaranya oleh Matsumoto (1993); Uchida dan Imai (1999); Yamamoto dan Keil (2000); Miho (2000 dan 2004); Huang dan Kathleen Ahren (2003); Bender dan Melanie Siegel (2004); Nishimitsu dan Mizuguchi Shinobu (2004); serta Wahyuni (2010).

Meskipun penelitian mengenai *numeral classifier* dalam berbagai bahasa di dunia sudah banyak dilakukan, penelitian mengenai *numeral classifier* bahasa Minangkabau hingga saat ini masih terbatas. Penelitian *numeral classifier* bahasa Minangkabau pernah dilakukan oleh Rina Marnita (1996) dengan mengambil titik pengamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, penelitian *numeral classifier* bahasa Minangkabau juga dilakukan oleh Sri Wahyuni, Nadra, dan Ria Febrina (2017) di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanahdatar.

## LANDASAN TEORI

*Numeral classifier* merupakan salah satu aspek bahasa yang penting dan selalu muncul bersamaan dengan numeralia. Hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh Mizuguchi (2004a:26) bahwa “*numeral classifiers are the classifiers that occur with a numeral or a quantifier*”. Selanjutnya, Miho (2004) menyatakan bahwa *numeral classifier* adalah salah satu jenis kata akhir yang menyertai angka, yang menunjukkan sifat dan jenis sasaran berdasarkan bentuk dan maknanya.

Penggunaan *numeral classifier* berfungsi untuk mengelompokkan dan menghitung benda. Pengelompokan dan penghitungan tersebut tentunya berkenaan dengan adanya benda yang dimaksud. Karena begitu banyaknya jenis benda yang dihitung, sejumlah peneliti membagi *numeral classifier* berdasarkan kategori tertentu.

Aikhenvald (2000) membagi *numeral classifier* menjadi dua jenis yang didasarkan pada pembagian menurut Lyon (1977), yaitu *sortal* dan *mensural*. *Sortal* adalah *numeral classifier* untuk menghitung satu per satu unit benda secara individual, sedangkan *mensural* adalah *numeral classifier* yang menyatakan ukuran. Selain itu, Mizuguchi (2004) juga telah melakukan pengelompokan terhadap *numeral classifier*. Namun, pengelompokan yang dilakukan Mizuguchi (2004) berbeda dengan Aikhenvald (2000). Mizuguchi mengelompokkan *numeral classifier* menjadi tiga jenis, yaitu *numeral classifier* individual, *numeral classifier* kolektif, dan *numeral classifier* ukuran. Mizuguchi menyatakan bahwa *numeral classifier* individual adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung unit terkecil atau untuk menghitung satu per satu benda-benda padat yang nyata. Sementara itu, *numeral classifier* kolektif adalah *numeral classifier* untuk menghitung benda-benda yang terbentuk dari dikumpulkannya beberapa unit terkecil atau beberapa individu. Lalu, *numeral classifier* ukuran adalah *numeral classifier* yang digunakan ketika mengukur suatu benda berdasarkan ukurannya.

Dalam bahasa Minangkabau di Nagari Aia Bangih, Kabupaten Pasaman Barat, ditemukan ketiga jenis *numeral classifier* seperti yang dikemukakan oleh



Mizuguchi (2004a). Pada umumnya, *numeral classifier* yang digunakan berdasarkan pada kearifan lokal masyarakatnya. Kearifan lokal yang dimaksud adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya (Sibarani, 2012). Ataupah (2004) menyatakan bahwa kearifan lokal bersifat historis dan positif. Nilai-nilai diambil oleh leluhur, kemudian diwariskan secara lisan kepada generasi berikutnya. Bahkan, Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 1986) menyatakan bahwa kearifan lokal mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk-bentuk dan penggunaan *numeral classifier* bahasa Minangkabau isolek Aia Bangih (selanjutnya disingkat dengan BMiAB) di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan demikian, diharapkan *numeral classifier* tersebut dapat didokumentasikan dan diwariskan kepada generasi mendatang.

### **METODE PENELITIAN**

Penyediaan data dilakukan dengan cara menyimak dan wawancara dengan informan, yaitu penutur bahasa Minangkabau di Nagari Aia Bangih, Kabupaten Pasaman Barat. Pada saat menyimak, digunakan teknik yang dikemukakan oleh Creswell (2002:140), yaitu (a) peneliti berpartisipasi penuh (peneliti menyembunyikan peran); (b) pengamat sebagai partisipan (peran peneliti diketahui); (c) partisipan sebagai pengamat (peran partisipan lebih kuat daripada peran pengamatan; dan (d) pengamat penuh (peneliti mengamati tanpa berpartisipasi). Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dalam daftar pertanyaan, yang berfungsi untuk memancing jawaban. Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan cara meminta informan untuk bercerita tentang berbagai hal, misalnya bercerita tentang cara membuat masakan. Data yang mengandung *numeral classifier* langsung dicatat pada kertas yang sudah disediakan. Apabila ditemukan penggunaan *numeral classifier* yang meragukan, pada saat itu juga ditanyakan langsung, tetapi dengan cara yang berbeda.

Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam tiga jenis *numeral classifier*, yaitu *numeral classifier* individual, *numeral classifier* kolektif, dan *numeral classifier* ukuran. Tiap-tiap data dihubungkan dengan melihat persamaan dan perbedaannya. Kemudian, setiap data diklasifikasikan lagi berdasarkan penggunaannya. Selanjutnya, data disajikan secara naratif dengan menguraikan kalimat demi kalimat.

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap sejumlah data, berikut ini dibahas *numeral classifier* yang digunakan oleh penutur BMiAB di Kabupaten Pasaman Barat. Data diklasifikasikan menjadi tiga jenis, berdasarkan pengklasifikasian Mizuguchi (2004), yakni *numeral classifier* individual, *numeral classifier* kolektif, dan *numeral classifier* ukuran. Berikut dijelaskan bentuk-bentuk *numeral classifier* bahasa Minangkabau dan penggunaannya oleh masyarakat di Aia Bangih.





### ***Numeral Classifier Individual***

Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan sebelas bentuk *numeral classifier* yang tergolong ke dalam *numeral classifier* individual BMiAB. Bentuk dan penggunaan *numeral classifier* tersebut dijelaskan berikut ini.

#### ***1. Urang***

*Urang* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung manusia. Selain untuk menghitung manusia, *numeral classifier urang* dalam BMiAB juga digunakan untuk menghitung makhluk gaib, seperti bidadari.

#### ***2. Ikua***

*Ikua* merupakan *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung hewan. Seluruh hewan dihitung menggunakan *numeral classifier*, baik yang berukuran kecil, sedang, maupun yang berukuran besar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *ikua* adalah satu-satunya *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung hewan.

#### ***3. Buah***

Masyarakat daerah ini menggunakan *numeral classifier buah* untuk menghitung buah-buahan, seperti jeruk, kelapa, durian, dan manggis. Selain itu, *numeral classifier* ini juga digunakan untuk menghitung buah dari tanaman, seperti cabai, buncis, dan kacang panjang. *Numeral classifier buah* juga digunakan untuk menghitung benda yang berbentuk bulat dan kecil, seperti, telur; peralatan makan dan masak.; buku dan alat tulis; kendaraan; dan perabot rumah tangga.

#### ***4. Bijo***

*Bijo* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung biji-bijian, seperti jagung, padi, dan kacang tanah. Selain itu, *bijo* juga digunakan untuk menghitung benda-benda yang berbentuk bulat kecil, seperti obat yang berbentuk tablet dan menghitung gigi.

#### ***5. Ole***

*Numeral classifier ole* digunakan untuk menghitung daun-daunan yang biasa dijadikan bumbu dalam masakan, seperti daun jeruk. *Numeral classifier* ini juga digunakan untuk menghitung: rambut; pakaian, kertas, papan, tikar, dan kasur yang berada alam keadaan terbentang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *ole* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung benda yang halus, tipis, dan datar.

#### ***6. Batang***

*Batang* merupakan *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung benda yang bulat, pipih, dan panjang. Benda yang biasanya dihitung dengan *numeral classifier batang* adalah pohon. Selain itu, *numeral classifier* ini juga digunakan untuk menghitung bumbu masak yang berbentuk bulat dan panjang, seperti serai dan daun bawang. *Numeral classifier batang* juga digunakan untuk menghitung benda-benda yang berbentuk silinder, seperti rokok, pensil, dan lemang. Kasur yang dalam keadaan digulung, karena gulungannya berbentuk silinder, juga dihitung dengan *numeral classifier batang*.

#### ***7. Bontuak***

*Bontuak* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung perhiasan, seperti cincin dan gelang. Meskipun *numeral classifier bontuak* digunakan untuk menghitung perhiasan, tidak ditemukan penggunaannya dalam menghitung perhiasan yang berupa kalung.



#### 8. *Unte*

*Unte* adalah *numeral classifier* yang khusus digunakan untuk menghitung perhiasan yang berupa kalung.

#### 9. *Tungkua*

*Tingka* merupakan *numeral classifier* yang dalam BMiAB digunakan untuk menghitung buah jagung. *Tungkua* dalam BMiAB bermakna ‘tongkol’ dalam bahasa Indonesia. Selain itu, dalam BMiAB ini, *numeral classifier tungkua* digunakan pula untuk menghitung benang yang dililitkan pada sebatang kayu. Satu gulungan benang tersebut disebut dengan *satungkua*.

#### 10. *Papan*

*Numeral classifier papan* dalam BMiAB merupakan *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung buah dari tumbuh-tumbuhan yang berbentuk memanjang dan tipis menyerupai sehelai papan. Dalam BMiAB, *numeral classifier* ini digunakan untuk menghitung buah petai dan buah kacang panjang.

#### 11. *Pucuak*

*Pucuak* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung senjata. Dalam BMiAB, *numeral classifier* ini digunakan dalam menghitung senjata, seperti senapan dan bedil.

### **Numeral Classifier Kolektif**

*Numeral classifier* kolektif yang digunakan untuk menghitung benda-benda secara kolektif dalam BMiAB terdiri atas delapan belas bentuk. Bentuk-bentuk dan penggunaan *numeral classifier* kolektif tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

#### 1. *Rumpun*

*Numeral classifier* rumpun digunakan untuk menghitung tanaman yang tumbuh secara berkelompok. *Numeral classifier* ini biasanya digunakan untuk menghitung tanaman, seperti padi, serai, bambu, pisang, tebu, dan bunga.

#### 2. *Punduk/tanjua*

Dalam pemakaiannya, *numeral classifier punduk* dan *tanjua* dapat saling dipertukarkan. *Punduk/tanjua* merupakan *numeral classifier* kolektif yang digunakan untuk menghitung buah yang terpisah sebagian dari batangnya berupa potongan dahan atau cabang, seperti pada buah rambutan dan petai. Potongan cabang rambutan yang berisi beberapa buah rambutan disebut dengan satu *punduk* atau satu *tanjua*. Begitu pula dengan buah petai, satu rangkaian buah petai yang dipisahkan dari dahannya dihitung sebagai satu *punduk* atau satu *tanjua*.

#### 3. *Tangke*

Dalam BMiAB, *tangke* merupakan *numeral classifier* kolektif yang khusus digunakan untuk menghitung bunga. Bunga yang dihitung secara kolektif dalam hitungan *tangke* tersebut berupa tangkai bunga yang dilekati beberapa bunga, lalu tangkai tersebut dipisahkan dari cabang atau ranting pohonnya dengan cara memotongnya.

#### 4. *Gagang*

*Numeral classifier gagang* merupakan *numeral classifier* kolektif yang digunakan untuk menghitung daun atau buah tumbuhan merambat, seperti sirih, ubi jalar, dan labu. Benda yang dihitung sebagai satu *gagang* adalah beberapa buah atau daun yang melekat pada sebuah *gagang* kecil tumbuhan merambat yang dipisahkan dari suatu *gagang* besar. Oleh karena itu, pada setiap *gagang* kecil terdapat beberapa



lembar daun atau beberapa buah dari tanaman tersebut.

#### 5. *Kobek*

*Numeral classifier kobek* digunakan untuk menghitung secara kolektif benda-benda padat yang disatukan dengan cara mengikatnya menggunakan tali atau benang. *Numeral classifier kobek* biasanya digunakan untuk menghitung sayur-mayur, seperti bayam, kacang panjang, dan daun singkong; petai; dan kayu api.

#### 6. *Joghek*

*Joghek* adalah *numeral classifier* kolektif yang digunakan untuk menghitung dua benda yang disatukan dengan cara mengikat keduanya. Dalam BMiAB, *numeral classifier joghek* digunakan untuk menghitung dua buah kelapa yang diikat menjadi satu.

#### 7. *Sikek*

*Sikek* adalah *numeral classifier* yang khusus digunakan untuk menghitung buah pisang secara kolektif. *Numeral classifier sikek* digunakan ketika menghitung beberapa buah pisang yang melekat pada suatu tampuk. Dalam BMiAB, beberapa buah pisang yang melekat pada tampukannya disebut satu *sikek*.

#### 8. *Tandan*

*Numeral classifier tandan* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung secara kolektif buah pisang dan buah kelapa. Benda yang disebut sebagai satu *tandan* adalah satu tangkai buah dipisahkan dengan cara memotong tangkai buah tersebut dari batangnya.

#### 9. *Palopa*

*Palopa* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung secara kolektif buah atau daun dari tanaman yang memiliki dahan berbentuk pelepah. Satu pelepah yang berisi buah atau daun tersebut disebut dengan satu *palopa*. Biasanya *numeral classifier* ini digunakan untuk menghitung kelapa, pinang dan lain-lain.

#### 10. *Ungguak*

Dalam BMiAB, kata *ungguak* merupakan *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung benda-benda yang dikolektifkan dalam bentuk tumpukan. *Numeral classifier* ini digunakan oleh masyarakat di pasar saat berjualan ikan, cabai, terung, tomat, jengkol, dan lain-lain.

#### 11. *Bungkus*

*Numeral classifier bungkus* digunakan untuk menghitung benda-benda yang dimasukkan ke dalam bungkus, baik bungkus plastic maupun kertas. Satu bungkus tersebut disebut sebagai satu *bungkus*. Benda-benda dalam bungkus tersebut tidak lagi dipandang sebagai benda satuan (individual), tetapi sebagai bentuk kolektif. Dalam BMiAB, *numeral classifier bungkus* digunakan untuk menghitung rokok, teh, kopi, gula, dan lain-lain yang berada dalam bungkus.

#### 12. *Pak*

*Pak* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung secara kolektif benda-benda, seperti rokok, garam, dan teh. Benda tersebut mula-mula dibungkus dalam bentuk bungkus kecil. Kemudian, beberapa bungkus kecil itu disatukan lagi dalam bungkus yang lebih besar. Satu bungkus besar yang terdiri atas beberapa bungkus kecil inilah yang disebut sebagai satu *pak*. Untuk menghitung rokok dalam bentuk bungkus yang lebih besar, selain digunakan *numeral classifier pak*, dapat pula digunakan *numeral classifier slof*.



### 13. *Susun*

*Susun* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung peralatan dapur, khususnya rantang. Rantang yang dihitung dengan *numeral classifier* *susun* tersebut merupakan satu kesatuan yang dikolektifkan (dimasukkan ke dalam alat untuk merangkainya) yang terdiri atas tiga, empat, lima, bahkan ada yang enam rantang. Satu set rangkaian yang terdiri atas beberapa buah rantang disebut satu *susun*. Selain menggunakan *numeral classifier susun*, rangkaian rantang ini dapat pula dihitung dengan *numeral classifier saghang*. Penggunaan kedua *numeral classifier* tersebut dapat saling dipertukarkan.

### 14. *Iyik*

*Numeral classifier iyik* digunakan untuk menghitung daun sirih secara kolektif. Sebanyak tujuh lembar daun sirih disusun dan disatukan. Susunan tujuh lembar daun sirih tersebut disebut dengan satu *iyik*.

### 15. *Kapua*

*Kapua* adalah *numeral classifier* kolektif yang digunakan dalam menghitung sirih yang lengkap dengan ramuannya. Daun sirih yang terdiri atas dua atau tiga lembar dijadikan sebagai pembungkus dan di dalamnya dibungkus dengan cara menggulungnya sekeping pinang, kapur sirih, dan gambir. Dalam menghitung gulungan tersebut digunakan *numeral classifier kapua*. Satu bungkus daun sirih beserta ramuannya itu disebut dengan *sakapua*.

### 16. *Lapiak*

*Lapiak* dalam BMiAB bermakna ‘tikar’ dalam bahasa Indonesia. Meskipun demikian, *numeral classifier lapiak* tidak digunakan dalam menghitung tikar, tetapi digunakan untuk menghitung benda-benda secara kolektif, seperti obat dan sampo. Satu lembaran yang berisi kira-kira 10 butir obat disebut dengan *salapiak* ‘satu *lapiak*’. Demikian pula dengan lembaran sampo yang terdiri atas 10 saset disebut dengan *salapiak*. *Numeral classifier lapiak* juga digunakan untuk menghitung telur secara kolektif. Tiga puluh butir telur yang ditempatkan dalam sebuah wadah kertas disebut dengan satu *lapiak*.

### 17. *Pasang*

*Pasang* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung benda-benda secara kolektif dalam bentuk berpasangan yang terdiri atas dua buah benda. Apabila suatu benda dihitung dengan menggunakan *numeral classifier pasang*, berarti benda tersebut tidak lagi dianggap sebagai benda tersendiri, tetapi sebagai dua benda yang dihitung secara kolektif. *Numeral classifier pasang* dapat digunakan untuk semua benda berpasangan, baik benda bernyawa maupun tidak. Benda berpasangan yang dihitung dengan menggunakan *numeral classifier pasang* dapat berupa pasangan manusia yang terdiri atas suami-istri serta laki-laki dan perempuan; pasangan benda yang terdiri atas kiri dan kanan, seperti tangan, kaki, mata, telinga, anting, gelang, sepatu, sandal dan kaus kaki; pasangan benda yang terdiri atas bagian atas dengan bawah, seperti baju dengan rok atau dengan celana.

### 18. *Patogak*

*Patogak* adalah *numeral classifier* kolektif yang khusus digunakan dalam menghitung benda-benda yang dilekatkan di bagian badan. *Numeral classifier patogak* digunakan ketika menghitung seperangkat benda yang selalu dipakai bersama-sama di bagian badan, dan benda yang satu menjadi pelengkap terhadap benda yang lainnya. Oleh karena itu, benda-benda yang dikolektifkan dan dijadikan satu kesatuan yang dihitung menggunakan *numeral classifier patogak* ini tidak



hanya pakaian yang terdiri atas baju dan celana/rok, tetapi juga dasi, kaus kaki, dan sepatu/sandal.

### ***Numeral Classifier Ukuran***

Dalam BMiAB juga ditemukan *numeral classifier* ukuran. *Numeral classifier* tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut.

#### **1. *Numeral Classifier Ukuran yang Menyatakan Jumlah Sebagian***

*Numeral classifier* ukuran yang menyatakan jumlah sebagian adalah ukuran yang digunakan terhadap suatu benda dengan cara mengambil sebagian dari benda tersebut. Benda yang diambil sebagian tersebut dijadikan sebagai ukurannya. Dalam BMiAB, ditemukan sepuluh bentuk *numeral classifier* yang dapat digolongkan ke dalam *numeral classifier* jenis ini. Bentuk-bentuk dan penggunaan setiap *numeral classifier* tersebut dijelaskan sebagai berikut.

##### **A. *Ghimpang***

*Numeral classifier ghimpang* digunakan untuk menyatakan jumlah sebagian dari benda-benda berupa umbi yang bercabang-cabang yang dipisahkan dari kesatuannya. *Numeral classifier* ini biasanya digunakan untuk menghitung jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lain. Selain itu, *numeral classifier* ini juga digunakan untuk menghitung jumlah sebagian dari bawang putih yang dipisahkan dari kesatuannya. Pada kasus ini, kata *ghimpang* tersebut dapat diartikan sebagai ‘siung’ dalam bahasa Indonesia.

##### **B. *Kalipak***

*Kalipak* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menyatakan jumlah sebagian dari buah jengkol. Apabila sebuah jengkol dikupas, isinya dapat dibelah menjadi dua bagian. Satu bagian buah itu disebut dengan *sakalipak* (satu *kalipak*). Selain itu, *numeral classifier kalipak* juga digunakan untuk menghitung asam kandis.

##### **C. *Ghiciah***

*Ghiciah* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menyatakan jumlah sebagian dari benda yang dipisahkan dari bagiannya yang lebih besar dengan cara memotongnya menjadi bagian yang lebih kecil. Biasanya, benda sasaran yang dihitung dengan menggunakan *numeral classifier* ini adalah daging, ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

##### **D. *Saik***

Sama seperti *ghiciah*, *saik* juga merupakan *numeral classifier* yang digunakan untuk menyatakan jumlah sebagian dari suatu benda yang dipisahkan dengan cara memotongnya menjadi bagian yang lebih kecil dari bagiannya yang lebih besar. Akan tetapi, objek sasaran yang yang dihitung dengan *numeral classifier ghiciah* berbeda dengan yang dihitung dengan *saik*. Potongan benda sasaran yang dihitung dengan menggunakan *numeral classifier saik* ukurannya lebih besar jika dibandingkan dengan potongan benda sasaran yang dihitung dengan *numeral classifier ghiciah*. *Numeral classifier saik* biasanya digunakan untuk menghitung potongan daging ayam, daging ikan, dan buah-buahan, seperti semangka.

##### **E. *Uwang***

*Uwang* dalam BMiAB berarti ‘ruang’ dalam bahasa Indonesia. Sebagai *numeral classifier*, *uwang* adalah *numeral classifier* ukuran yang digunakan untuk menghitung jumlah sebagian dari buah durian. Pada buah durian yang dikupas akan terlihat isi buah yang berada dalam bagian buah yang terlihat seperti ruang-ruang.



Isi buah yang berada dalam satu ruang tersebutlah yang disebut dengan *sauwang* 'satu ruang'. Selain untuk menghitung durian, masyarakat BMiAB juga menggunakan *numeral classifier uwang* untuk menghitung jumlah sebagian dari isi buah jeruk dan isi buah manggis yang dipisahkan dari keseluruhan isi buah tersebut.

#### F. *Uweh*

*Numeral classifier uweh* digunakan untuk menyatakan ukuran jumlah sebagian dari sebatang benda yang memiliki ruas, seperti pada bambu dan tebu. Selain itu, *numeral classifier* ini juga digunakan untuk menghitung bagian antarsendi jari. *Numeral classifier uweh* digunakan dalam menghitung jumlah ruas pada bambu, tebu, ataupun pada jari yang merupakan jumlah sebagian dari satu kesatuan benda tersebut.

#### G. *Bolah*

*Bolah* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung benda yang jumlahnya menyatakan separuh dari suatu benda berpasangan. Meskipun demikian, numeral classifier ini tidak dapat digunakan dalam menghitung semua benda yang berpasangan, melainkan hanya untuk menghitung benda berpasangan yang berupa benda mati. Oleh karena itu, *numeral classifier* ini tidak digunakan untuk benda bernyawa, seperti pada manusia dan hewan. Dalam BMiAB, *numeral classifier* ini digunakan untuk menghitung separuh benda yang berpasangan, seperti tangan, kaki, telinga, sandal, sepatu, kaus kaki, dan anting-anting.

#### H. *Kuduang*

*Kuduang* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menyatakan jumlah sebagian dari sebuah benda yang dipisahkan dengan cara memotong-motong benda tersebut. Pada umumnya, *numeral classifier* ini digunakan untuk menghitung benda-benda yang berbentuk silinder yang dipotong-potong sedemikian dan potongannya itu menyatakan jumlah sebagian dari benda keseluruhannya. Dalam menghitung jumlah sebagian dari potongan benda itu disebut dengan *sakuduang*. *Numeral classifier kuduang* ditemukan dalam menghitung potongan kayu api, bumbu masak, seperti serai, dan lemang (masakan yang dibuat dalam tabung yang bentuknya silinder).

#### I. *Kopiang*

*Kopiang* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menyatakan jumlah sebagian dari sebuah benda yang umumnya berbentuk bulat yang dipisahkan dengan cara membelah benda tersebut. Jumlah sebagian dari benda yang dibelah itu disebut dengan *sakopiang*. *Numeral classifier* ini digunakan dalam menghitung jumlah sebagian dari sebuah buah kelapa yang dibelah. Selain itu, *numeral classifier* ini digunakan dalam menghitung jumlah sebagian dari sebuah gula jawa.

#### J. *Suntiah*

*Suntiah* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menyatakan jumlah sebagian dari sebuah benda yang umumnya berbentuk datar yang dipisahkan dengan cara menyobek benda tersebut. *Numeral classifier* ini digunakan dalam menghitung jumlah sebagian dari sehelai kertas, atau sehelai kain.

## 2. ***Numeral Classifier* Ukuran yang Menyatakan Jumlah Total**

*Numeral classifier* ukuran jumlah total adalah *numeral classifier* yang digunakan ketika menghitung benda-benda yang dikumpulkan dalam jumlah tertentu. Dalam BMiAB, *numeral classifier* satuan ukuran terdiri atas dua bentuk



yang menyatakan jumlah total, seperti berikut ini.

A. *Kodi*

*Kodi* adalah *numeral classifier* yang menyatakan ukuran dalam jumlah total dua puluh. Biasanya, *numeral classifier* ini digunakan dalam kegiatan jual beli grosiran benda-benda, seperti pakaian dan sepatu.

B. *Lusin*

*Lusin* adalah *numeral classifier* yang menyatakan ukuran dalam jumlah total dua belas buah. *Numeral classifier* ini digunakan dalam menghitung benda-benda, seperti benda keperluan masak dan makan.

### 3. *Numeral Classifier* Ukuran Berdasarkan Bentuk Benda

Dalam BMiAB, *numeral classifier* ukuran yang didasarkan pada bentuk bendanya terdiri atas tiga bentuk seperti berikut ini.

A. *Titiak*

*Titiak* digunakan untuk menghitung zat cair yang menetes. Oleh karena itu, *numeral classifier* ini digunakan ketika menghitung benda-benda yang menetes, seperti air, air mata, embun, keringat, dan minyak. Bentuknya yang berupa tetesan itulah yang menjadi ukurannya. Satu tetesan zat cair itu disebut dengan *satitiak*.

B. *Kopa*

*Kopa* digunakan untuk menghitung benda-benda yang berbentuk bongkahan yang dibuat dengan cara ditekan-tekan dalam gengaman tangan. *Numeral classifier kopa* biasanya digunakan untuk menghitung benda-benda, seperti nasi dan tanah.

C. *Bingkah*

*Bingkah* adalah *numeral classifier* yang digunakan untuk menghitung benda-benda yang berbentuk bongkahan. *Numeral classifier* ini digunakan ketika menghitung benda-benda, seperti garam dan gula yang mengeras, nasi yang menggumpal, dan benda-benda lain yang dibuat mengental, seperti gula aren dan gambir. Dalam BMiAB, *numeral classifier bingkah* juga digunakan untuk menghitung bawang putih, lengkuas, dan jahe karena benda-benda tersebut juga berbentuk bongkahan. Satu bongkahan bawang putih yang terdiri atas beberapa biji disebut satu *bingkah*.

### 4. *Numeral Classifier* Ukuran Berdasarkan Jumlah Tindakan

Dalam BMiAB, *numeral classifier* ukuran berdasarkan jumlah tindakan terdiri atas empat bentuk. Bentuk-bentuk dan penggunaan masing-masing *numeral classifier* tersebut dapat dilihat berikut ini.

A. *Suok*

*Suok* digunakan ketika menghitung jumlah makanan yang dimasukkan ke dalam mulut, khususnya nasi. Nilai takaran yang disebut dengan *sasuok* adalah sebanyak jumlah makanan yang dijumpit dengan lima jari dan dimasukkan ke dalam mulut ketika makan.

B. *Pipiah*

*Pipiah* digunakan ketika menyebut jumlah biji jagung yang dipipil dengan sebelah tangan. Jumlah biji jagung yang dapat dipipil dengan sebelah tangan dalam sekali pipil disebut dengan *sapipiah*.

C. *Ghoguak*

*Ghoguak* digunakan ketika menyatakan jumlah benda cair, seperti air, kopi, teh, dan jus yang dapat diminum dalam sekali teguk. Satu *ghoguak* adalah takaran zat cair yang dapat diminum dalam sekali teguk.



#### D. *Gotok*

*Gotok* digunakan ketika menghitung buah pinang. Satu *gotok* pinang adalah ukuran pinang yang dapat dibalut dengan daun sirih dalam sekali makan. Biasanya, ukuran satu *gotok* pinang adalah sebesar satu biji pinang dibagi delapan.

### 5. *Numeral Classifier* Satuan Ukuran

*Numeral classifier* satuan ukuran dapat dikelompokkan menjadi satuan ukuran volume, ukuran panjang, ukuran berat, dan ukuran luas/besar. Penjelasan mengenai setiap *numeral classifier* satuan ukuran adalah sebagai berikut.

#### A. *Numeral Classifier* Satuan Ukuran yang Menyatakan Volume

Dalam BMiAB terdapat *numeral classifier* ukuran yang menyatakan volume berdasarkan banyaknya benda yang dapat diambil dengan menggunakan bagian tubuh manusia. Bagian tubuh manusia yang biasa digunakan untuk menghitung volume adalah jari dan tangan. *Numeral classifier* ukuran volume yang menjadikan bagian tubuh ini sebagai patokannya adalah sebagai berikut.

- 1) *Cibik* adalah *numeral classifier* ukuran volume berdasarkan jumlah benda yang dapat dijepit di antara ujung-ujung jari. *Numeral classifier cibik* digunakan untuk menakar bumbu masak.
- 2) *Kawuk* adalah *numeral classifier* yang menjadikan telapak tangan sebagai ukuran. *Numeral classifier kawuk* merupakan ukuran volume yang ukurannya adalah volume benda yang dapat diambil dengan telapak tangan. *Numeral classifier kawuk* dalam BMiAB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *kawuk godang* dan *kawuk kociak*. *Kawuk godang* adalah takaran benda sebanyak yang dapat diambil dengan merapatkan kedua telapak tangan, sedangkan *kawuk kociak* adalah takaran benda sebanyak yang dapat diambil dengan menggunakan sebelah tangan.
- 3) *Gonggam* merupakan *numeral classifier* yang menjadikan telapak tangan manusia sebagai ukuran volume. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara keduanya. Yang dikatakan dengan *kawuk* adalah jumlah volume benda yang dapat diambil dengan telapak tangan yang dicekamkan pada benda yang diambil, sedangkan yang dikatakan dengan *gonggam* adalah jumlah volume benda yang dapat dibawa dalam kepalan telapak tangan yang dihadapkan ke bagian atas.

Selain menggunakan bagian tubuh, dalam menakar volume benda, masyarakat daerah ini juga mengenal enam bentuk *numeral classifier* satuan ukuran. *Numeral classifier* tersebut adalah liter, *taka*, *sukek*, *kulak*, kubik dan *belet*. *Numeral-numeral classifier* ini biasanya digunakan untuk menakar beras, padi, kacang-kacangan, dan lain-lain.

Dalam menakar volume benda, volume satu *taka* adalah volume yang setara dengan 1/3 liter, satu *sukek* setara dengan lima liter, dan satu *kulak* setara dengan dua *sukek* atau 10 liter.

Sama seperti liter, *numeral classifier* kubik yang digunakan dalam BMiAB adalah *numeral classifier* yang berasal dari ukuran internasional. *Numeral classifier* kubik biasanya digunakan ketika menakar pasir.

*Belet* adalah benda berbentuk persegi yang terbuat dari logam. Sebagai *numeral classifier* satuan ukuran volume, *belet* biasanya digunakan ketika menakar volume biji-bijian, seperti padi dan jagung. Volume satu *belet* setara dengan 24 kilogram.





## **B. Numeral Classifier Ukuran yang Menyatakan Panjang**

Dalam BMiAB terdapat tujuh bentuk *numeral classifier* ukuran yang digunakan untuk menyatakan panjang benda. *Numeral classifier* ukuran panjang tersebut adalah *jongka*, *eto*, *dopo*, *meter*, *yar*, *bal*, dan *kilo*. *Numeral classifier* *jongka*, *eto*, *dopo* merupakan *numeral classifier* tradisional yang menggunakan tangan sebagai patokan dalam ukurannya. Sementara itu, empat *numeral classifier* ukuran panjang lainnya, yaitu *meter*, *yar*, *bal*, dan *kilo* adalah satuan ukuran panjang yang berlaku secara internasional. *Numeral classifier* *yar* adalah *numeral classifier* satuan ukuran panjang yang nilainya setara dengan 90 sentimeter, sedangkan *bal* adalah satuan ukuran panjang yang nilainya setara dengan 50 *yar*.

*Jongka* adalah *numeral classifier* ukuran panjang yang menjadikan tangan manusia sebagai ukurannya. *Jongka* adalah ukuran panjang benda yang diukur berdasarkan rentangan antara ujung ibu jari tangan dan ujung jari kelingking.

*Eto* adalah *numeral classifier* satuan ukuran yang digunakan untuk mengukur panjang benda. *Saeto* adalah ukuran panjang yang diukur menggunakan lengan bawah, mulai dari ujung jari tengah sampai ke siku. Sebagai *numeral classifier* satuan ukuran panjang, *eto* biasanya digunakan ketika mengukur panjang benda yang datar dan tipis, seperti kain dan benang.

Dalam BMiAB, *numeral classifier* *dapo* digunakan sebagai satuan ukuran dalam mengukur panjang. Nilainya diukur berdasarkan rentangan kedua belah tangan orang dewasa. *Dapo* diukur dari ujung jari tengah tangan kanan sampai ujung jari tengah tangan kiri. Nilai satuan ukuran *dapo* setara dengan empat *eto*.

## **C. Numeral Classifier yang Menyatakan Berat**

Dalam BMiAB terdapat lima bentuk *numeral classifier* yang menyatakan satuan ukuran berat. *Numeral classifier* tersebut adalah *gaghih*, *kilo*, *gram*, *omeh*, dan *bunci*.

*Numeral classifier* *kilo* dan *gram* merupakan satuan ukuran berskala internasional yang digunakan untuk menakar berat benda. Kedua bentuk *numeral classifier* ini digunakan dalam kegiatan jual beli. *Numeral classifier* *kilo* digunakan ketika menakar berat benda, seperti minyak goreng, gula, dan tepung, sedangkan *numeral classifier* *gram* digunakan dalam menakar berat emas. Selain menggunakan *numeral classifier* *gram*, pengukuran berat emas juga menggunakan dua bentuk *numeral classifier* lainnya, yakni *omeh* dan *bunci*. *Numeral classifier* *omeh* adalah takaran untuk mengukur bobot emas yang beratnya setara dengan 2,5 gram, sedangkan *bunci* adalah takaran yang beratnya setara dengan 1/100 *omeh*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa satu *omeh* setara dengan 100 *bunci*.

Selain *numeral classifier* yang telah dijelaskan di atas, dalam BMiAB juga terdapat *numeral classifier* lain yang digunakan untuk penghitungan berat benda. *Numeral classifier* tersebut adalah *gaghi*. Kata *gaghi* dalam BMiAB berarti 'garis'. Garis yang dimaksud adalah garis yang terdapat pada alat ukuran berat (timbangan). Oleh karena itu, sebagai *numeral classifier*, satuan ukuran berat *gaghi* setara dengan 100 gram.

## **D. Numeral Classifier yang Menyatakan Luas/Besar**

Dalam BMiAB terdapat empat bentuk *numeral classifier* yang digunakan untuk mengukur luas/besarnya benda. *Numeral classifier* tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) *Ompo* adalah *numeral classifier* yang pengukurannya menggunakan jari. Kata *ompu* dalam BMiAB bermakna jempol dalam bahasa Indonesia. Ukuran



- besarnya kira-kira sebesar jempol orang dewasa, disebut *saompu* dalam BMiAB.
- 2) *Pantak* adalah *numeral classifier* yang digunakan ketika mengukur luas tanah atau lahan. Ukuran luas tanah satu *pantak* setara dengan 15x10 *depa*.
  - 3) *Numeral classifier* kayu adalah *numeral classifier* yang digunakan ketika mengukur besarnya kertas. Ukuran kertas satu kayu setara dengan 120x100 sentimeter.
  - 4) *Goma* adalah *numeral classifier* yang digunakan ketika mengukur besarnya benda. Pengukuran *goma* berdasarkan pertemuan antara jari jempol dan jari telunjuk yang membentuk lingkaran. Dalam BMiAB, *numeral classifier goma* digunakan untuk menghitung gabah yang diikat.

## PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam BMiAB terdapat tiga jenis *numeral classifier*, yaitu *numeral classifier* individual, *numeral classifier* kolektif, dan *numeral classifier* ukuran. *Numeral classifier* individual terdiri atas sebelas bentuk, yaitu *urang*, *ikua*, *buah*, *bijo*, *ole*, *batang*, *bontuak*, *unte*, *tungkua*, *papan*, dan *pucuak*, sedangkan *numeral classifier* kolektif terdiri atas delapan belas bentuk, yaitu *rumpun*, *punduk (tanjua)*, *tangke*, *gagang*, *kobek*, *joghek*, *sikek*, *tandan*, *palopa*, *ungguak*, *bungkuh*, *pak*, *susun*, *iyik*, *kapua*, *lapiak*, *pasang*, dan *patogak*. *Numeral classifier* ukuran yang terdapat dalam BMiAB dapat dikelompokkan menjadi ukuran yang menyatakan jumlah sebagian, ukuran yang menyatakan jumlah total, ukuran berdasarkan bentuk benda, ukuran berdasarkan tindakan, dan *numeral classifier* satuan ukuran. Untuk ukuran yang menyatakan jumlah sebagian terdiri atas sepuluh bentuk *numeral classifier*, yaitu *ghimpang*, *kalipak*, *ghicia*, *saik*, *uwang*, *uweh*, *bolah*, *kuduang*, *kopiang*, dan *suntiah*, sedangkan untuk ukuran yang menyatakan jumlah total terdiri atas dua bentuk, yaitu *kodi* dan *lusin*. Dalam BMiAB terdapat tiga bentuk *numeral classifier* ukuran yang didasarkan bentuk bendanya, yaitu *titiak*, *bingkah*, dan *kopa*, sedangkan untuk *numeral classifier* ukuran yang didasarkan pada jumlah tindakan terdiri atas lima bentuk, yaitu *suok*, *pipiah*, *ghoguak*, dan *gotok*. *Numeral classifier* satuan ukuran yang terdapat dalam BMiAB dapat dikelompokkan menjadi satuan ukuran volume, satuan ukuran panjang, satuan ukuran berat, dan satuan ukuran luas/besar. Untuk satuan ukuran volume terdiri atas sembilan bentuk *numeral classifier*, yaitu *cibik*, *kawuk*, *gonggam*, *liter*, *taka*, *sukek*, *kulak*, *kubik*, dan *belet*, untuk satuan ukuran panjang terdiri atas tujuh bentuk *numeral classifier*, yaitu *jongka*, *eto*, *dopo*, *meter*, *yar*, *bal*, dan *kilo*, untuk satuan ukuran berat terdiri atas lima bentuk *numeral classifier*, yaitu *gagih*, *kilo*, *gram*, *omeh*, dan *bunci*, dan untuk satuan ukuran luas/besar terdiri atas empat bentuk *numeral classifier*, yaitu *ompu*, *pantak*, *kayu*, dan *goma*. Penggunaan setiap bentuk tersebut ditentukan oleh jenis benda yang menjadi sasaran hitungannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, K. (1986). Numeral Classifier in Austroasiatic, In Craig (Ed.). *Noun Classes and Categorization*. Amsterdaam: Jhon Benjamins.
- Aikhenvald, AY. (2000). *Classifier: A Typology of Noun Categorization Devices*. Oxford University Press.
- Ataupah. (2004). "Peluang Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam Pembangunan". Kupang: Dephut Press.
- Ayatrohaedi. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Becker, A.J. (1986). "The Figure a Classifier Makes: Describing a Particular Burmese Classifier". In Craig ed. *Noun Classes and Categorization*. Amsterdaam: Jhon Benjamins.
- Bender, EM.and Siegel, M. (2005). "Implementing of the Syntax of Japanese Numeral Classifier". *Computer Science*.
- Creswell, J. W. (2002). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. (translate by: Angkatan III & IV KIK-UI bekerja sama dengan Nur Khabibah). Jakarta: KIK Press.
- Eieiko, T. (2004). "Ryubetsushi no Youhou kara Mita Birmago no Goitokuchou". in Mizuguchi, Shinobu dan Nishimitsu Yoshihiro (Ed.) *Ruibetsushi no Taishou*. Tokyo: Kuroshio Shuppan.
- Huang, C.R. and Ahren, K. (2003). "Individuals, Kinds and Events: Classifier Coercion of Nouns". *Language Science*.
- Hopper, P. J. (1986). "Some Function of Classifiers in Malay". In Craig ed. *Noun Classes and Categorization*. Amsterdaam: Jhon Benjamins.
- Kiryuu, K. (2004). "Nawaarugo no Ruibetsushi.In Nishimitsu Yoshihiro dan Mizuguchi Shinobu. (Ed.) *Ruibetsushi no Taishou*. Tokyo: Kuroshio Shuppan.
- Matsumoto, Y. (1993). "Japanese Numeral Classifier: A Study of Semantic Categories and Lexical Organization". *Lingustic*.
- Miho, T. (2000). *Nihoggo Josuushi no Rekishi Kenkyuu*. Tokyo: Kazamashobo.
- Miho, T. (2004). *Mokkan to Shosoin Bunsho ni Ukeru Josushi Kenkyu*. Tokyo: Kazamashobo.
- Mizuguchi, S. (2004). *Individuation in Numeral Classifier Languages: A case of Japanese Classifiers and Plurals*. Tokyo: Shohakusha.
- Nadra, Wahyuni, S & Mahsun. (2014). "Bentuk dan Penggunaan Kata Penggolong Benda di Pasar Induk Tradisional di Jakarta dan Surabaya". *LITERA: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*.
- Nadra dan Sri Wahyuni. (2015). *Numeral Classifiers Used in the Cookbooks. Macrothink Institute International Journal of Linguistics*.
- Marnita, R. (1996). "Classifier in Minangkabau". Canberra: Australian National University.
- Mizuguchi, S. (2004). *Individuation in Numeral Classifier Languages: A Case of Japanese Classifiers and Plurals*. Tokyo: Shohakusha.
- Salehuddin, K., & Winskel, H. (2011). "Object Categorization Using Malay-Shape-based Numeral Classifier. GEMA: OnlineTM". *Journal of Language Studies*.
- Sibarani, R. (2012). *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).



- Uchida, N & Imai M. (1999). Heuristic in Learning Classifier: The Acquisition of the Classifier System and Its Implications for the Nature of Lexical Acquisition. *Japanese Psychological Research*.
- Wahyuni, S. (2006). *Numeral Classifier in Indonesian*. Japan: Shimane University.
- Wahyuni, S. (2010). “Kata Bantu Bilangan Penghitung Binatang dalam Bahasa Jepang”. *Jurnal Linguistika Kultura*.
- Wahyuni, S. (2015). *Numeral Classifier Bahasa Indonesia*. Padang: SURI dan FIB Unand.
- Wahyuni, S, Nadra, & Ria Febrina. (2017). The Mensural Numeral Classifier Based on the Local Wisdom of Minangkabau Community at Tanah Datar Regency. *Macrothink Institute International Journal of Linguistics*.
- Yamamoto, K and Frank, K. (2000). “The Acquisition of Japanese Numeral Classifier: Linkage between Grammatical Form and Conceptual Categories”. *Journal of East Asian Linguistic*.
- Zhang, H. (2007). “Classifier in Mandarin Chinese”. *Journal of East Asian Linguistics*.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Sri Wahyuni, Nadra, dan Ria Febrina  
Judul makalah : *Numeral Classifier* Bahasa Minangkabau Isolek Ala Bangih  
Hari, tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.00  
Moderator : Drs. Muhammad Muis, M.Hum.  
Pencatat : 1. Dewi Khairiah  
2. Nadia Almira Sagitta

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Aia Bangih adalah nama nagari di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat yang berada di tepi laut. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Minangkabau isolek Aia Bangih. Arti Aia Bangih adalah air yang bengis.
2. Bahasa Minangkabau mengalami perubahan.
3. Bahasa Minang umum memiliki tingkat yang lebih tinggi sehingga beberapa bahasa daerah lainnya terpinggirkan.
4. Aspek kosakata yang diteliti adalah *numeral classifier* di Aia Bangih.
5. Metode penelitian adalah simak dan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.
6. Ada tiga macam pengelompokan *numeral classifier* menurut Mizuguchi, yaitu individual, kolektif, dan ukuran. Ketiga *numeral classifier* ini ada dalam bahasa Aia Bangih.
7. *Numeral classifier* individual terdiri atas sebelas bentuk.
8. *Numeral classifier* kolektif terdiri atas delapan belas bentuk.
9. *Numeral classifier* ukuran terdiri atas empat kelompok, yakni jumlah total, sebagian, bentuk benda, dan satuan ukuran.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Syarifuddin

Instansi : -

**Pertanyaan:**

1. Apakah *numeral classifier* termasuk kelas kata?
2. Penelitian ini masuk ranah linguistik apa?
3. Apakah Aia Bangih itu termasuk bahasa atau dialek?
4. Apakah ada penanda untuk menentukan penggolongan/klasifikasi tersebut?

**Jawaban:**

1. *Numeral classifier* bukan kelas kata. Kami memakai istilah bahasa Inggris karena belum ada padanan yang tepat untuk *numeral classifier*.
2. Kami tidak meneliti dialek, maka dari itu kami memakai istilah isolek. Belum diketahui Minangkabau umum dan Aia Bangih tergolong bahasa atau dialek.
3. Bahasa Minang tidak memiliki penanda untuk kata penggolong.



**Penanya 2**

Nama : Leni Syafri Yahya  
Instansi : Universitas Andalas

**Pertanyaan:**

Apa keunikan kata penggolong dalam bahasa Minang Aia Bangih dibandingkan dengan bahasa Minang umum?

**Jawaban:**

Keunikan tersebut, misalnya, terdapat dalam kata *bijo* dalam bahasa Aia Bangih, tetapi masyarakat Kabupaten Pasaman menyebutnya *bijit* dan Kabupaten Pariaman menyebutnya *incek*.

**Penanya 3**

Nama : Andi Sahtiani Jahrir  
Instansi : Universitas Islam Makassar

**Pertanyaan:**

Sejauh mana kita bisa memopulerkan kembali jati diri bahasa daerah?

**Jawaban:**

Saya pernah menetap di Jepang selama enam tahun. Saya sudah memberi les bahasa Indonesia kepada anak saya. Dia tidak pandai berbahasa Minangkabau. Akan tetapi, setelah remaja, dia mahir berbahasa Minangkabau karena di kampusnya wajib menggunakan bahasa daerah. Barangkali ini bisa menjadi metode untuk memopulerkan bahasa daerah.



## 9. Simpang Siur Pengelolaan Pembelajaran Bahasa Daerah Bugis dan Bahasa Daerah Makassar

### SIMPANG SIUR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH BUGIS DAN BAHASA DAERAH MAKASSAR

**Syahrudin**

Universitas Muslim Maros  
syahrudinudin30@gmail.com

#### **Abstrak**

Bahasa Bugis dan bahasa Makassar memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kedua bahasa daerah ini memiliki aksara tersendiri yang lazim disebut aksara lontara. Aksara lontara merupakan warisan budaya yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, untuk menumbuhkembangkan rasa keintaan dan kebanggaan terhadap aksara lontara, perlu dioptimalkan pembelajaran bahasa daerah Bugis dan Makassar di sekolah. Di samping itu, bahasa daerah juga perlu dilestarikan sehingga dapat tumbuh kembali seperti pada masa silam menjadi bahasa ilmu pengetahuan dalam bentuk sastra lisan dan sastra klasik Bugis-Makassar. Bahasa Daerah di sekolah telah dijadikan sebagai mata pelajaran muatan lokal pada lembaga pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA, dan SMK). Namun, mata pelajaran Bahasa Daerah Bugis dan Makassar di sekolah masih menyatu dalam pembelajaran bahasa daerah dengan pembelajaran aksara lontara. Hal ini mengalami kesimpangsiuran yang disebabkan oleh (1) penerapan kurikulum, (2) pengetahuan dan kemampuan guru, (3) pengetahuan bakat dan kemauan belajar siswa, (4) pendekatan dan sistem pengajaran, sarana (5) sarana dan kondisi sekolah.

**Kata-kata kunci:** simpang siur, bahasa Bugis, bahasa Makassar

#### **Abstract**

*The Bugis and Makassar languages have one of the features that are not shared by all local languages in Indonesia. It is because of the languages in this area has its own script that is commonly called lontara script. Lontara script is one of a high value cultural heritage. Therefore, to cultivate a sense of love and pride of lontara script, it needs to be optimized to learning Bugis local language and Makassar local language in school. In addition, the local languages need to be preserved so they can grow again as before to become the science language in the form of oral literature and classical literature of Bugis-Makassar. The local language subjects in schools have been used as a local content subjects for elementary and junior high schools. However, the subjects of Bugis local languages and Makassar local language in schools are still integrated between the learning of local languages with learning lontara script. It is make confusion that is caused by (1) the application of curriculum, (2) the teacher's knowledge and ability, (3) the talent and willingness to learn of the students, (4) the approach and the teaching system, and (5) the facilities and conditions of the school.*

**Keywords:** maze, Bugis language, Makassar language



## PENDAHULUAN

Bahasa Bugis dan Makassar merupakan dua jenis bahasa daerah yang hidup berdampingan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua bahasa itu memiliki aksara yang sama, yakni lontara. Namun, kedua bahasa ini memiliki karakter bahasa yang berbeda sehingga pemakaian bahasa ini hanya digunakan etnis yang memahami bahasa Bugis atau Makassar. Etnis yang menggunakan bahasa Bugis adalah suku Bugis dan bahasa Makassar digunakan oleh suku Makassar. Walaupun suku Bugis dan Makassar memiliki bahasa daerah yang berbeda, tetapi mereka hidup rukun dan damai dengan budaya adat istiadat dan agama yang sama.

Said (1997: 5) mengemukakan bahwa dewasa ini bahasa Bugis dan Makassar mengalami kemunduran karena keberadaannya tidak ditopang lagi oleh tradisi tulis, baik aksara lontara maupun aksara lain. Bahasa Bugis dan Makassar tidak lagi menjadi bahasa tulis, tetapi menjadi bahasa lisan. Oleh karena itu, bahasa Bugis dan Makassar dengan sendirinya tidak lagi menjadi bahasa ilmu pengetahuan, seperti tempo dulu.

Perlu ada upaya yang sungguh-sungguh untuk tetap melestarikan salah satu warisan yang bernilai tinggi. Dengan demikian, untuk menumbuhkan rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap aksara lontara, sudah selayaknya diupayakan berbagai cara agar pemakaian bahasa daerah Bugis dan Makassar serta aksara lontara tidak punah. Dengan kata lain, bahasa daerah Bugis dan Makassar tetap menjadi bahasa komunikasi dan informasi bagi penuturnya. Di samping itu, aksara Lontara juga tetap lestari dan dapat tumbuh kembali seperti pada masa silam menjadi bahasa ilmu pengetahuan.

Kenyataan menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa daerah Bugis dan Makassar di sekolah telah dimasukkan sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam bidang seni budaya dan prakarya. Pembelajaran ini perlu diajarkan pada dua aspek, yaitu aspek berbahasa dan menulis aksara lontara. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa Bugis dan Makassar perlu ditunjang dengan kemampuan menulis aksara lontara. Namun, dewasa ini, tidak semua penutur bahasa Bugis dan Makassar memiliki kemampuan menulis dengan aksara lontara. Di samping itu, menulis dengan menggunakan aksara lontara juga tidak dapat dilakukan tanpa pemahaman terhadap huruf-huruf yang digunakan karena aksara lontara pada setiap huruf mewakili suku kata bukan fonem. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang intensif di sekolah.

Untuk mempelajari tulisan atau huruf, sebaiknya kita harus mengetahui sedikit tentang bahasa dan tidak sebaliknya. Bahasa dan tulisan merupakan dua hal yang berbeda. Dalam mempelajari dan mengajarkan sebuah bahasa dapat saja menggunakan segala macam bentuk dan jenis huruf (alfabetis, silabis, dan logografis).

Kewajiban sekolah memuat muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan melalui Pasal 37 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 (Harsono, 2009: 3). Selain itu, ada pula Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang pembinaan bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, lembaga pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA, dan SMK) wajib memuat muatan lokal dalam kurikulumnya. Salah satu muatan lokal yang diajarkan pada lembaga pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah bahasa daerah Bugis atau Makassar.





Berdasarkan hal di atas, penulis melakukan kajian tentang simpang siur pengelolaan pembelajaran bahasa daerah Bugis dan Makassar di sekolah. Kajian tulisan ini fokus pada kesimpangsiuran pengelolaan pembelajaran bahasa daerah Bugis dan Makassar yang disebabkan oleh (1) penerapan kurikulum, (2) pengetahuan dan kemampuan guru, (3) bakat dan kemauan belajar siswa, (4) pendekatan dan sistem pengajaran, dan (5) sarana dan kondisi sekolah.

## PEMBAHASAN

### Aksara Lontara dalam Bahasa Daerah Bugis-Makassar

Dalam pustaka Bugis klasik dikenal *surek* dan *lontara*. Selanjutnya, puisi dalam sastra Bugis klasik dibedakan menjadi tiga jenis, yakni *galigo*, *tolok*, dan *elong*. Ketiga bentuk puisi ini termasuk *surek*. Selain itu, dikenal pula yang disebut *lontara*. Lontara ini meliputi semua pustaka Bugis yang bukan sastra. Menurut Mattulada (1985) *lontara* sebenarnya bukan sastra, tetapi bentuk pustaka yang isinya diuraikan secara deskriptif. *Lontara* pada dasarnya bukan karya sastra, melainkan karya yang bersifat kesejarahan.

Lontara dalam bahasa Bugis-Makassar bisa berarti aksara, sejarah, dan juga kitab atau naskah. Jadi tergantung konteksnya. Misalnya: *ma' baca lontara* (<sup>mbc</sup> lotr) yang berarti membaca lontara, merujuk pada benda, yakni kitab atau naskah. Selanjutnya, *ma' ruki lontara* (<sup>mruki</sup> lotr) berarti menulis *lontara*, merujuk pada menulis sejarah atau menulis dengan aksara lontara.

Pustaka Bugis dan Makassar, baik yang klasik maupun nonklasik, ditulis dengan sistem tulisan silabis, yang disebut aksara lontara. Aksara lontara ini telah digunakan oleh masyarakat Bugis dan Makassar sebagai media komunikasi dan informasi sejak berabad-abad yang lalu.

Siapa pencipta aksara lontara ini dan kapan lahirnya masih menjadi perbedaan dan perdebatan di kalangan para pakar. Namun, dikatakan bahwa *galigo* ditulis pada abad ke-7 sampai abad ke-10. Ada pula yang berpendapat bahwa *galigo* ditulis pada abad ke-14. Jadi, aksara lontara diperkirakan tercipta sejak abad ke-7 sampai dengan abad ke-14.

Said (1997: 2) mengemukakan bahwa aksara lontara terbagi atas aksara lontara lama dan aksara lontara baru. Aksara lontara lama mempunyai persamaan dengan Kawi, sedangkan aksara lontara baru lebih menyerupai aksara Sumatra atau aksara kaganga seperti rejang, lampung, dan rencong. Aksara lontara lama biasa disebut tulisan burung (*uki manuk-manuk*) sedangkan aksara lontara baru sering disebut tulisan segi empat (*uki sulapak eppa*).

Aksara lontara lama menyerupai huruf Kawi dan aksara lontara baru lebih mirip dengan aksara Sumatra (waktu penciptaannya diduga pada zaman Kerajaan Sriwijaya, yakni abad ke-7 M). Dengan demikian, kemungkinan besar, huruf lontara baru (*uki sulapak eppa*) lebih tua daripada lontara lama (*uki manuk-manuk*). Kedua Lontara, baik Lontara lama maupun baru tetap digunakan. Misalnya, huruf burung (lontara lama) dipakai suku Makassar dalam perjanjian Bongaya, sedangkan huruf segi empat (lontara baru) dipakai suku Bugis dalam naskah *Galigo* yang ditulis antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-14.

Banyak anggapan yang menyatakan bahwa penciptaan tanda-tanda bunyi yang disebut aksara lontara berpangkal pada kepercayaan dan pandangan mitologis orang Bugis-Makassar. Pandangan tersebut adalah anggapan bahwa alam semesta ini *sulapa eppa walasuji* (segi empat belah ketupat). Pandangan alam semesta ini,



adalah satu kesatuan dinyatakan dalam simbol /<sup>s</sup>/ = sa yang berarti *seua* (tunggal atau esa).

Aksara lontara, baik yang segi empat maupun huruf burung, sifatnya fonetis, silabis, dan vokalis. Artinya, huruf itu melambangkan bunyi suku kata yang berakhir dengan vokal. Oleh karena itu, aktualisasinya agak sukar, terutama bagi mereka yang penguasaan bahasa Bugis atau bahasa Makassarinya belum memadai (Rapi, 1993).

Aksara lontara Bugis terdiri atas 23 huruf, sedangkan lontara Makassar terdiri atas 19 huruf. Perbedaan antara aksara lontara Bugis dan aksara lontara Makassar, yakni pada aksara lontara Bugis dikenal huruf *ngka*, *mpa*, *nca*, dan *nra*, sedangkan pada aksara lontara Makassar huruf tersebut tidak ada. Semua pengucapan pada aksara lontara berakhir dengan bunyi /a/. Selain itu, huruf lontara tergolong tulisan silabis (suku kata) dan untuk menandai vokalnya menggunakan tanda-tanda tertentu. Cara menuliskan huruf lontara adalah dari kiri ke kanan. Adapun aksara lontara seperti di bawah ini.

1.	k	Ka	2.	g	ga	3.	G	nga	4.	K	ngka
5.	p	Pa	6.	b	ba	7.	m	ma	8.	P	mpa
9.	t	Ta	10	d	da	11.	n	na	12.	R	nra
13.	c	Ca	14	j	ja	15.	<sup>N</sup> nya	16.	<sup>C</sup> nca		
17.	<sup>`</sup> y	Ya	18	r	ra	19.	<sup>l</sup> la	20.	<sup>w</sup> wa		
21.	s	Sa	22.	<sup>a</sup> a	23.	<sup>h</sup> ha					

Huruf-huruf di atas disebut *ina surek* yang artinya induk huruf. Apabila pada *ina surek* dibubuhi tanda-tanda tertentu, akan timbul variasi bunyi yang bermacam-macam. Tanda-tanda itu disebut *ana' surek* 'anak huruf' yang ditempatkan pada berbagai posisi seperti berikut ini.

1. Tanda ( <sup>e</sup> ), tempatnya di depan *ina surek*, menghasilkan bunyi /e/.
2. Tanda ( <sup>o</sup> ), tempatnya di belakang *ina surek*, menghasilkan bunyi /o/.
3. Tanda ( <sup>Δ</sup> ), tempatnya di atas *ina surek*, menghasilkan bunyi /e<sup>h</sup>/.
4. Tanda ( <sup>.</sup> ), tempatnya di atas *ina surek*, menghasilkan bunyi /i/; dan di bawah *ina surek*, menghasilkan bunyi /u/(Sikki, 1991: 4).

### Belajar Menguasai Bahasa Berbeda dengan Menguasai Aksara

Di antara lebih 400 bahasa di nusantara, bahasa Bugis bersama beberapa bahasa lain yang jumlahnya tidak banyak, memiliki tradisi penulisan sendiri atau aksara. Aksara (tulisan) bukanlah bahasa, melainkan hanyalah salah satu cara untuk merekam bahasa dengan simbol-simbol yang kasatmata. Sejak ribuan tahun yang lalu, Tiongkok, Mesir, dan Mesopotamia telah menggunakan tulisan, tetapi kebanyakan bahasa yang digunakan sekarang ini ada yang baru saja menggunakan tulisan, bahkan ada bahasa yang sampai sekarang ini tidak mempunyai tulisan.

Bahasa digunakan sepanjang sejarah oleh manusia yang berawal dari tidak dapat membaca dan menulis sampai manusia dapat membaca dan mengenal tulisan



melalui pendidikan. Namun, bahasa manusia tetap stabil, teratur, dan kaya seperti bahasa dari manusia yang tidak beraksara. Bahasa itu sama sekali tidak terkait dengan sistem tulisan mana yang dipakai untuk merekamnya. Begitu pula dengan manusia, dari segi mana pun potret manusia itu diambil, dia tetap manusia juga. Ketika orang Melayu mengganti huruf Jawi (huruf Arab Melayu) menjadi huruf Latin dan orang Turki mengganti huruf Arab menjadi huruf Latin, orang Melayu dan orang Turki tetap berbicara dengan cara yang sama seperti sebelum terjadi penggantian huruf.

Untuk mempelajari tulisan atau huruf, sebaiknya kita mengetahui sedikit tentang bahasa dan bukan sebaliknya. Bahasa dan tulisan merupakan dua hal yang berbeda. Dalam mempelajari dan mengajarkan sebuah Bahasa, kita bisa saja menggunakan segala macam bentuk dan jenis huruf (alfabetis, silabis, dan logografis).

Pemisahan yang jelas antara bahasa dan tulisan dalam proses penguasaan bahasa sendiri, kadang-kadang terlupa waktu kita mengajar atau belajar bahasa kedua ataupun bahasa asing. Kesalahan dalam mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing ialah kita mempelajarinya melalui tulisan. Proses penguasaan tulisan merupakan suatu proses tersendiri yang berbeda dengan penguasaan bahasa kedua atau bahasa asing. Kesalahan ini makin bertambah jika sistem tulisan kedua bahasa itu mirip atau berbeda. Belajar bahasa Bugis atau Makassar misalnya, merupakan masalah tersendiri, yang berbeda dengan belajar membaca dan menulis aksara lontara. Artinya, bahasa Bugis dan bahasa Makassar bisa saja dipelajari atau diajarkan tanpa aksara lontara. Orang yang ingin mengetahui bahasa Bugis dan Makassar yang tertulis dalam aksara lontara tentu saja perlu mengetahui aksara lontara karena bahasa Bugis dan Makassar (khususnya pustaka klasik) tertulis dalam aksara lontara. Namun, perlu ditegaskan di sini bahwa aksara lontara hanya salah satu wahana bahasa Bugis dan Makassar. Wahana aksara lontara sebagai wahana bahasa Bugis dan Makassar dapat saja diganti dengan wahana lain, misalnya wahana aksara latin (sistem alfabetis dan bukan sistem silabis).

Belajar menguasai bahasa dan belajar menguasai aksara merupakan dua hal yang berbeda. Pembelajaran bahasa Bugis dan Makassar di sekolah akan menjadi sulit apabila kedua hal di atas dilaksanakan bersamaan dan dalam waktu bersamaan. Pembelajaran aksara lontara sudah pasti termasuk belajar bahasa Bugis atau bahasa Makassar. Namun, pembelajaran bahasa Bugis atau bahasa Makassar belum tentu bisa belajar aksara lontara. Oleh karena itu, perlu pemisahan antara belajar bahasa dan belajar aksara lontara dalam pembelajaran bahasa daerah Bugis dan Makassar.

### **Kemunduran Tradisi Tulis dengan Aksara Lontara**

Dewasa ini, bahasa Bugis dan Makassar mengalami kemunduran karena keberadaannya tidak ditopang lagi oleh tradisi tulis, baik aksara lontara maupun aksara latin. Dokumen-dokumen, baik berbentuk buku, surat, maupun naskah-naskah pidato atau khotbah bertuliskan aksara lontara sukar untuk didapatkan lagi yang. Oleh karena itu, bahasa daerah Bugis dan Makassar tidak lagi menjadi bahasa tulis, tetapi hanya menjadi bahasa lisan. Bahasa Bugis dan Makassar dengan sendirinya tidak lagi menjadi bahasa ilmu pengetahuan seperti *tempo doeloe*.

Tradisi tulis dengan teks aksara lontara bahasa Bugis dan Makassar perlu dilestarikan lagi sebagai warisan budaya nusantara. Lebih mudah menulis daripada membaca teks yang menggunakan aksara lontara. Membaca teks yang



menggunakan aksara lontara, seorang pembaca harus memahami bahasa Bugis atau bahasa Makassar yang digunakan oleh teks tersebut karena kalau tidak maka kemungkinan besar ia akan salah dalam menyebut sebuah kata. Perhatikan teks lontara berikut ini.

*spai aidonu*

Jika pembaca tidak memahami bahasa Bugis, kemungkinan besar akan salah dalam membaca teks di atas, misalnya ia membacanya dengan:

1. *Sapai idonu*
2. *Saapai idonu*
3. *Sappai indonu*
4. *Sappaing indonu*
5. *Sappai indonung*

Pembaca yang memahami bahasa Bugis akan tahu bahwa teks di atas dibaca seperti pada nomor 3 yang artinya adalah „cari ibumu“. Mengapa demikian? Hal ini karena kata *sapai*, *idonu*, *saapai*, *sappaing*, dan *indonung* tidak dikenal dalam bahasa Bugis. Kenyataan yang terjadi sekarang pada masyarakat Bugis dan Makassar adalah kurangnya minat menulis dan membaca dengan aksara lontara. Hal ini mengakibatkan bahasa daerah Bugis dan Makassar tidak lagi menjadi bahasa tulis dan bahasa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, besar kemungkinan kedua bahasa tersebut akan berangsur-angsur menjadi musnah. Hal tersebut tidak perlu diragukan lagi (Said, 1997: 4).

Tingkat kebakuan dan kaidah-kaidah bahasa daerah Bugis dan Makassar semakin rendah karena hanya ditopang oleh bahasa lisan. Kosakata yang digunakan pun makin berkurang jumlahnya, walaupun penutur bahasa Bugis dan bahasa Makassar mungkin bertambah karena orang yang lahir dari etnis Bugis dan Makassar jumlahnya bertambah. Namun, kenyataannya, mereka yang dapat menulis dan membaca huruf lontara yang berbahasa Bugis dan berbahasa Makassar jumlahnya semakin sedikit. Semakin lama, bahasa Bugis dan Makassar semakin tidak mengenal bahasa tulis. Hal ini perlu mendapat perhatian, baik pemerintah maupun orang yang mengaku beretnis Bugis ataupun Makassar. Salah satu unsur yang bisa membantu agar keberadaan aksara lontara dalam bahasa Bugis dan Makassar tetap bertahan, yakni dengan penerapan kaidah-kaidah bahasa tersebut dalam mata pelajaran Bahasa Daerah di sekolah.

### **Solusi Pengelolaan Pembelajaran Bahasa Daerah Bugis-Makassar**

Simpang siur pembelajaran bahasa daerah Bugis dan Makassar akan terus terjadi di sekolah apabila tidak segera diberi solusi dalam pengelolaannya. Bahasa Bugis dan Makassar serta aksara lontara merupakan warisan budaya nenek moyang kita sebagai media komunikasi dan informasi yang sudah berlangsung berabad-abad yang lalu. Hal ini bisa saja hilang atau tidak terpakai lagi oleh penuturnya jika tidak dirancang dengan baik oleh lembaga pendidikan nasional. Oleh karena itu, pelestarian budaya perlu dilakukan dengan menerapkan sistem pembelajaran bahasa daerah yang intensif dan bermakna kepada siswa.

Setelah memperhatikan uraian di atas, maka langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam merancang pengelolaan pembelajaran bahasa daerah Bugis dan Makassar di sekolah sebagai berikut

1. Penerapan kurikulum



- a. Kurikulum dalam penerapannya perlu membedakan pembelajaran bahasa dengan pembelajaran aksara lontara. Belajar memahami bahasa dan belajar memahami aksara merupakan dua hal yang berbeda. Siswa perlu mempelajari bahasa Bugis dan bahasa Makassar serta aksara lontara sehingga ia dapat berbicara dengan menggunakan bahasa serta menulis dan membaca dengan aksara lontara.
  - b. Kurikulum yang digunakan oleh guru bahasa daerah perlu keseragaman agar standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dimiliki siswa tidak jauh berbeda. Dengan adanya kompetensi berbahasa yang sama, siswa dapat menggunakan bahasa tersebut dalam berkomunikasi.
  - c. Bahasa Bugis dan Makassar perlu diajarkan secara intensif di sekolah-sekolah dengan menempatkannya sebagai mata pelajaran dalam kurikulum muatan lokal. Pemerintah daerah perlu melakukan rekayasa kurikulum bahasa daerah agar tujuan dan sasaran pembelajaran dapat tercapai sesuai budaya daerah itu sendiri.
2. Pengetahuan dan kemampuan guru
- a. Pengajar mata pelajaran Bahasa Daerah Bugis dan Makassar hendaknya guru dari jurusan pendidikan bahasa daerah tersebut. Sesuai survei yang dilakukan oleh penulis, 70% guru mata pelajaran bahasa daerah di Sulawesi Selatan bukan dari jurusan bahasa daerah. Hal ini tidak bisa dimungkiri karena kurangnya guru bahasa daerah Bugis dan Makassar akibat LPTK (lembaga pendidikan tinggi keguruan) tidak lagi membuka program studi pendidikan bahasa daerah Bugis dan pendidikan bahasa daerah Makassar.
  - b. Dinas pendidikan perlu memprogramkan kegiatan penataran dan pelatihan pengajaran bahasa daerah. Penataran dan pelatihan bagi guru bahasa daerah akan memberikan pengetahuan dan penyegaran terhadap sistem dan metode pembelajaran bahasa daerah.
  - c. Guru mata pelajaran Bahasa Daerah perlu memiliki pengetahuan dan kemampuan mengajar bahasa daerah dengan baik. Khusus guru bahasa daerah Bugis dan Makassar perlu memiliki kecakapan substansi seni budaya Bugis dan Makassar serta kecakapan menulis dan membaca dengan aksara lontara.
  - d. Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan kelompok kerja guru (KKG) bahasa daerah perlu berjalan secara optimal. Wadah ini diharapkan mampu memberi pengetahuan dan pengalaman mengajar bahasa daerah bagi guru.
3. Pengetahuan dasar, bakat dan kemauan belajar siswa
- a. Pengetahuan dasar bahasa daerah bagi siswa perlu ditanamkan dengan melibatkan pihak keluarga dan unsur masyarakat agar selalu cinta terhadap bahasa daerahnya. Pihak keluarga dan unsur masyarakat etnis Bugis dan Makassar hendaknya selalu menggunakan bahasa Bugis atau Makassar dalam berkomunikasi sehari-hari, baik kepada sesama etnis maupun kepada para remaja atau siswa. Hal ini tentu selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi formal dan nonformal.
  - b. Bakat siswa dalam berbahasa Bugis dan Makassar akan meningkat apabila bahasa ini selalu digunakan dalam berkomunikasi. Di samping itu, bakat menulis dengan aksara lontara juga akan tampak apabila siswa selalu diberi tugas menulis dan membaca aksara lontara. Oleh karena itu, dengan adanya



- bakat siswa yang baik, pembelajaran bahasa daerah di kelas akan lebih efektif.
- c. Siswa perlu memahami tujuan pembelajaran bahasa daerah Bugis dan Makassar sehingga minat dan kemauan siswa belajar bahasa daerah lebih optimal. Apabila siswa sudah memahami manfaat belajar bahasa daerah, pembelajaran di kelas akan bermakna.
  - d. Perlu pembiasaan agar siswa menggunakan aksara lontara dalam berbagai bentuk tulisan sebagai media komunikasi dan informasi berbahasa Bugis atau Makassar. Dengan demikian, aksara lontara dapat berfungsi sebagai bahasa tulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
  - e. Faktor lingkungan siswa perlu selalu menggunakan bahasa Bugis atau bahasa Makassar dalam berkomunikasi sehari-hari, baik dalam masyarakat maupun keluarga atau kerabat.
4. Pendekatan dan sistem pembelajaran
- a. Pendekatan dan sistem pembelajaran bahasa daerah harus dinamis karena kemampuan siswa dalam berbahasa daerah masih heterogen. Pendekatan dan sistem pembelajaran kepada siswa yang berasal dari keluarga yang sudah menggunakan bahasa Bugis atau Makassar akan berbeda dengan siswa dari keluarga yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa kedua atau sama sekali tidak menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari.
  - b. Dinas pendidikan atau lembaga lain yang peduli terhadap bahasa daerah perlu melaksanakan diklat/penataran sistem pengajaran bahasa daerah secara intensif kepada guru bahasa daerah.
  - c. Pembelajaran bahasa daerah di kelas masih menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Hal ini perlu diperbaiki karena pembelajaran bahasa daerah Bugis atau bahasa daerah Makassar di kelas seharusnya menggunakan bahasa daerah tersebut.
  - d. Pemakaian aksara lontara dalam menulis tidak perlu diganti dengan huruf Latin dalam pembelajaran bahasa daerah Bugis dan Makassar di kelas. Dengan demikian, siswa akan terlatih dan terbiasa dalam menulis dan membaca informasi dengan aksara lontara.
  - e. Sistem pembelajaran mulok bahasa daerah di sekolah sebaiknya dilakukan dengan menggunakan sistem pembelajaran berbasis portofolio. Sistem ini akan menyimpan hasil kerja siswa sebagai dokumen pembelajaran.
5. Sarana dan kondisi sekolah
- a. Sarana dan prasarana sekolah perlu menunjang pembelajaran bahasa daerah, seperti, laboratorium bahasa, media informasi yang menggunakan aksara lontara, dan papan informasi khusus yang menggunakan aksara lontara berbahasa Bugis atau Makassar.
  - b. Kondisi sekolah menyesuaikan dengan pembelajaran bahasa daerah. Karakter fisik sekolah harus kondusif dalam menunjang pembelajaran bahasa daerah. Dalam hal ini sekolah harus memberikan keleluasaan pemakaian bahasa daerah bagi siswa. Selain itu, sekolah juga harus bebas dari tekanan untuk tidak menggunakan bahasa daerah di lingkungan sekolah. Dengan demikian, bahasa daerah Bugis dan Makassar dapat digunakan di lingkungan sekolah oleh siswa secara bebas tanpa ada tekanan.



Pemakaian bahasa daerah tersebut tetap harus memperhatikan situasi formal dan nonformal.

- c. Kegiatan dan sistem pembelajaran bahasa daerah di lingkungan sekolah yang berada di kota dengan sekolah di pedalaman sangat berbeda. Siswa yang berada di pedalaman biasanya sudah mahir menggunakan bahasa daerah Bugis atau Makassar karena bahasa ini merupakan bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, siswa yang berada di perkotaan belum mahir menggunakan bahasa daerah. Dengan demikian, sistem pembelajaran bahasa daerah di sekolah pedalaman dengan sekolah di perkotaan perlu dilaksanakan dengan pendekatan proses pembelajaran yang berbeda.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa simpang siur pengelolaan pengajaran bahasa daerah Bugis dan Makassar semakin tampak di sekolah. Berkaitan dengan hal itu, perlu ada solusi pembelajaran bahasa daerah yang konstruktif. Namun, perlu dipertimbangkan supaya bahasa Bugis dan Makassar diajarkan bersama dengan aksara lontara. Hal ini dilakukan agar pembelajaran memiliki nilai seni budaya yang tinggi dan menjadi sumber ilmu pengetahuan.

Bahasa perlu dibedakan dengan tulisan. Belajar bahasa Bugis dan Makassar berbeda dengan belajar aksara lontara karena bahasa Bugis dan Makassar dapat dipelajari tanpa aksara lontara. Namun, bahasa Bugis dan Makassar serta aksara lontara tetap harus dilestarikan karena kesemuanya memiliki nilai budaya dan sejarah yang panjang.

Bahasa Bugis dan Makassar tidak lagi menjadi bahasa ilmu pengetahuan karena tidak didukung dengan bahasa tulisan. Salah satu penyebabnya adalah karya-karya berupa buku, artikel-artikel, jurnal ilmiah, atau media cetak belum banyak menggunakan bahasa Bugis atau Makassar. Oleh karena itu, kedua bahasa tersebut perlu dijadikan bahasa tulisan yang populer, baik dengan aksara lontara maupun aksara Latin.

Berikut ini adalah beberapa solusi dalam pengelolaan pengajaran bahasa Bugis dan Makassar di sekolah agar dapat menjadi mata pelajaran yang bermakna bagi siswa adalah sebagai berikut (1) penerapan kurikulum, (2) pengetahuan dan kemampuan guru, (3) pengetahuan dasar, bakat, dan kemauan belajar siswa, (4) pendekatan dan sistem pengajaran, serta (5) sarana dan kondisi sekolah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hamid. (1985). *Manusia Bugis–Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Ambo Enre, Fachruddin. (1983). “Ritumpanna Welenrennge: Telaah Filologi sebuah Episode Sastra Bugis Klasik.” Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Erickson, H. Lynn. (2002). *Concept-Based Curriculum and Instruction: Teaching Beyond the Facts*. California: Corwin Press, Inc.
- Halliday, M.A.K. (2002). *Language as a Social Semiotics*. London: Edward-Arnold.
- Hamzah, Aminah P, dkk. (1984). *Monografi Kebudayaan Bugis di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Pemda Tk.I Sulsel.
- Harsono. (2009). “Pengelolaan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah (Studi Kasus di Dua SMP Negeri Kota Surakarta).” *Jurnal Eksplanasi* Volume 4 Nomor 8. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hunaenah. (2015). *Andragogi*. Modul Diklat PKB. Bandung. PPPPTK IPA.
- Mattulada. (1985). *Latoa: Satu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahim, A. Rahman. (1985). *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Unhas.
- Said D.M., M. Ide. (1997). “Beberapa Kendala dalam Pengajaran Akasara Lontara dan Upaya Penanggulangannya”. Makalah. Ujung Pandang: IKIP UP.
- Sikki, Muhammad. (1991). *Tata Bahasa Bugis*. Jakarta: Depdikbud.
- Syahrudin. (1995). “Wanita dalam Konsepsi Masyarakat Bugis.” Makalah. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Tang, Muhammad Rapi. (1993). *Tolok Rumpakna Bone, Sebuah Telaah Filologi Sastra Bugis Klasik*. Ujung Pandang: IKIP UP.





**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Syahrudin  
Judul Makalah : “Simpang Siur Pengelolaan Pembelajaran Bahasa Daerah Bugis dan Bahasa Daerah Makassar”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.00  
Moderator : Drs. Muhammad Muis, M.Hum.  
Pencatat : 1. Dewi Khairiah  
2. Nadia Almira Sagitta

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Bahasa Bugis dan Makassar adalah dua bahasa yang memiliki aksara yang sama, yakni aksara lontara,
2. Saat ini, Bahasa Bugis dan Makassar tidak lagi ditopang tradisi tulis seperti dahulu.
3. Banyak anak-anak yang tidak mampu berbahasa daerah, padahal memiliki orang tua yang mampu berbahasa daerah.
4. Ada peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembinaan Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan. Semua sekolah diharuskan mengajarkan bahasa daerah, tetapi kenyataannya banyak sekolah yang belum maksimal karena guru kurang mumpuni.
5. Lembaga perguruan tinggi keguruan tidak lagi membuka jurusan pendidikan bahasa Bugis dan Makassar.
6. Di Universitas Negeri Makassar hanya ada pendidikan bahasa daerah (Duri, Makassar, Bugis, Toraja, Mandar), tidak fokus pada satu bahasa.
7. Istilah lontara memiliki dua makna; buku, maruki lontara ‘menulis lontara’ atau mabbaca lontara ‘membaca buku’.
8. Banyak yang bisa berbahasa Bugis dan Makassar, tetapi belum tentu bisa menulis dengan aksara lontara.
9. Jika mau menulis aksara lontara, seseorang perlu memahami bahasa Bugis atau Makassar agar mengerti konteks.
10. Simpang siur pengelolaan perlu menjadi perhatian bagi dinas pendidikan dalam pengembangan bahasa daerah ke depan karena maju mundurnya penggunaan bahasa daerah tergantung pembinaan bahasa daerah.
11. Beberapa solusi dalam pengelolaan pembelajaran bahasa daerah adalah sebagai berikut.
  - a. penerapan keseragaman kurikulum karena sekolah menerapkan kurikulum sesuai dengan kemauannya. Hal itu menjadikan kurikulum tidak seragam;
  - b. pengetahuan dan kemampuan guru yang mengajar bahasa daerah bukan alumnus jurusan bahasa daerah;
  - c. kemauan belajar siswa dalam mempelajari bahasa daerah;
  - d. pendekatan dan sistem pembelajaran; dan
  - e. sarana dan kondisi sekolah.

**Penanya 1**

Nama : Syarifuddin

Instansi : -

**Pertanyaan:**

Dalam paparan Bapak, disebutkan bahwa penutur bahasa Bugis dan Makassar tidak saling mengetahui bahasa masing-masing, tetapi di luar tanah Sulawesi Selatan, mereka saling mengetahui. Di NTB, bahasa Makassar dijadikan *lingua franca* antara bahasa Bajo, Bugis, Makassar, dan Mandar. Itu artinya, mereka memiliki kesepahaman satu sama lain.

**Jawaban:**

1. Bahasa Bugis dan Makassar memiliki perbedaan. Bahasa Bugis tidak bisa dipadukan dengan bahasa Makassar meskipun adat istiadat, kesenian, dan arsitektur rumahnya sama.
2. Orang perantauan kental dengan emosional kedaerahannya karena tidak mau kehilangan warisan dari leluhurnya, yakni bahasa.
3. Di Makassar ada kampung Bugis. Kalau ada orang Makassar menikah dengan orang Bugis di dusun tersebut, dia dapat berbicara bahasa Bugis dengan cepat.

**Penanya 2**

Nama : Leni Syafri Yahya

Instansi : Universitas Andalas

**Pertanyaan:**

Apakah aksara lontara memiliki konsonan dan vokal?

**Jawaban:**

Aksara Lontara tidak mengenal bunyi konsonan pada akhir silabel.

**Penanya 3**

Nama: Andi Sahtiani Jahrir

Instansi: Universitas Islam Makassar

**Pertanyaan:**

Sejauh mana sebenarnya kita bisa memopulerkan kembali jati diri bahasa daerah?

**Jawaban:**

Kita bisa melakukannya dengan mengajarkannya di sekolah. Daripada mengajarkan bahasa daerah tertentu pada siswa, sebaiknya siswa diberi hak memilih sendiri bahasa daerah yang ingin dipelajarinya.





## **G. SUBTEMA 7: BAHASA, SASTRA, DAN KEKUATAN KULTURAL BANGSA**

### **1. Bahasa, Sastra, dan Kekuatan Kultural Bangsa BAHASA, SASTRA, DAN KEKUATAN KULTURAL BANGSA**

**Hariyono**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Salam Pancasila maknanya adalah bahwa pengamalan Pancasila itu tanggung jawab kita, warga negara Indonesia. Insyaallah lima jari di atas bahu tidak ada tafsir politik karena Pancasila adalah lima sila dan jari kita ada lima.

Anak yang disebut Malin Kundang adalah anak yang tidak mau mengakui eksistensi ibunya. Mengapa? Karena ibunya dianggap inferior, miskin, bodoh, dan seterusnya. Barangkali metafora ini juga bisa kita gunakan untuk analogi apa yang dikatakan oleh Pak Maryanto tadi bahwa mental inferior kita sebagai sebuah bangsa masih cukup kuat. Jika kita menggunakan apa yang kita miliki, baik bahasa, sastra, maupun budaya, seolah-olah kita masih belum setara dengan bangsa lain. Seorang pakar manajemen membuat analogi, yaitu serangan dari luar mudah diantisipasi jika serangan itu sifatnya kekerasan, tetapi serangan dari luar yang dilakukan dengan cara pelan-pelan, itu justru tidak mudah diantisipasi. Contohnya, katak yang dimasukkan ke air panas biasanya selamat. Mengapa? Jika dimasukkan ke air panas, katak masih bisa melompat. Sebaliknya, jika dimasukkan ke air yang dingin, kemudian air dingin itu dihangatkan, setelah sekitar 70 derajat celsius, katak baru merasakan kepanasan dan ketika mau melompat, katak sudah tidak mampu lagi untuk melompat. Demikian pula eksistensi kita sebagai kekuatan bangsa, ancaman terhadap sebuah negara sering kali bukan lagi kekerasan fisik, melainkan persuasi-persuasi yang sifatnya hegemoni dalam tataran budaya, tataran sastra, dan tataran bahasa. Dengan begitu, kita sering kali merasa tidak percaya diri dengan bahasa yang kita gunakan. Padahal, jauh sebelumnya, baik tokoh-tokoh yang mengadakan Sumpah Pemuda maupun yang relatif baru pada tahun 1970-an, seperti salah satu pakar intelektual di Indonesia, almarhum Sudjatmoko juga sudah mengingatkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pergerakan, bahasa Indonesia adalah sebuah bahasa yang bisa mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa bahasa bukan hanya sebuah alat komunikasi, melainkan struktur kognisi. Dalam struktur kognisi ini cara orang bicara dan berpikir menentukan bahasa. Jauh sebelum itu, pergerakan juga sudah punya *joko montro* dalam bahasa Jawa, yaitu semacam kata-kata yang digunakan untuk menjadikan dirinya percaya diri, seperti mantra yang digunakan ketika anak-anak Trikorodharmo menjalani pendidikan dan menjadi Jong Java, salah satu organisasi pelopor organisasi pemuda yang menyebut tiga hal, yaitu *shakti*, *buddhi*, dan *bhakti*. Artinya, jika kita ingin bangsa Indonesia tidak ingin terjajah lagi, kita harus sakti, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, kita harus berkarakter dan berbudi. Kita harus menjadi orang yang berbudi-berkarakter. Orang yang pandai tidak punya makna apa-apa jika tidak punya *bhakti*, yaitu orang yang tidak mengabdikan pada bangsa dan negaranya. Artinya, konsep sakti, budi, dan bakti yang dikembangkan oleh Trikorodharmo ini tidak jauh berbeda dengan konsep yang digunakan oleh sejarawan kelas internasional,



yaitu bahwa ciri-ciri di dalam proses peradaban adalah tidak mungkin peradaban bisa sukses jika peradaban itu tidak punya akar dengan nilai-nilai yang dipakai oleh nenek moyangnya sehingga dipelajari 22 peradaban. Mengapa sukses? Salah satunya adalah karena adanya akar budaya yang cukup kuat. orang-orang Eropa bisa kembali dan keluar dari abad pertengahan, abad ke-8, setelah berinteraksi dengan orang-orang Timur Tengah, orang-orang Arab dalam perang Salib. Mereka menemukan kembali nilai-nilai budaya humanisme yang ada pada masa Yunani Romawi. Bersamaan sentuhan kekerasan fisik juga ternyata ada sentuhan budaya. Dengan mengenal budayanya lagi orang-orang Eropa bisa kembali berjaya. Sejak dahulu mereka ternyata punya akar budayanya, yaitu budaya Eropa sekarang yang merupakan budaya Yunani dan Romawi. Demikian juga, Jepang bisa menjadi negara yang sangat maju dan hebat karena yang berkuasa sebelumnya itu menyadari bahwa ia tidak bisa bertahan lagi sehingga ketika diserang Amerika, ia berusaha untuk menangkap nilai-nilai budaya Jepang yang sesungguhnya. Dalam ajaran Jepang tumbuh kepercayaan diri bahwa tidak akan terjadi bahasa Inggris yang nomor satu, bahkan di jalan-jalan itu rata-rata nama jalan dan tulisan masih berbahasa Jepang. Begitu juga dengan Cina, setelah mengalami revolusi budaya, Cina tidak akan berhasil menerapkan anarkisme komunisme yang dikaitkan dengan korpus Cina sukses sekarang. Partai yang berkuasa adalah partai komunis, tetapi selalu digunakan kata, diksi, dan budaya untuk melegitimasi dan sekaligus menjadi orientasinya.

Jika kita ingin menjadi bangsa yang besar, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus menoleh lagi masa lalu kita, tujuan bangsa kita dulu salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Apakah kita rela bahasa Indonesia kemudian menjadi nomor dua di negerinya sendiri? Di ruang publik sering kali bahasa Indonesia disisihkan, baik oleh pihak kuasa, rakyat yang kurang mengerti, maupun lembaga negara, sehingga ketika dicek nanti jalan-jalan dan iklan-iklan yang ada di pinggir jalan, termasuk larangan untuk pemasangan papan iklan pun sering kali menggunakan bahasa Inggris, seperti *space-space available*, *space foreign*, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah yang mau menggunakan dan menyewa itu siapa. Tanpa kita sadari, penggunaan bahasa dan kebudayaan adalah problem spiritual, problem keyakinan, yaitu selama mental kita masih rendah, selama kita tidak punya kepercayaan diri, maka di situ wawasan budaya kita tidak akan kuat. Dalam kaitan budaya, contohnya adalah di NTT, Papua, atau Madura mereka jika di sana tidak suka makan makanan yang berasal dari potensi alam yang kita miliki, kita akan kesulitan. Misalnya, saat pulang ke Madura, kita susah bukan main mencari nasi jagung, padahal dulu jagung adalah makanan pokok orang Madura. Artinya, kebudayaan kita sudah terkontaminasi.

Padaahal, kita diperlihatkan terutama oleh anak-anak muda jika ingin bangsa kita merdeka, kita perlu hubungan yang menyatu, tanah air satu, tanah air Indonesia. Akan tetapi, tanah air itu tidak akan mungkin bisa menjadi warisan yang baik jika kita belum memilih persatuan sesama elemen bangsa. Kita perlu bersatu, tetapi kita tidak mungkin bisa bersatu kalau kita tidak memiliki bahasa persatuan. Bahasa adalah alat pemahaman. Sebagai contoh, jika Bapak-Ibu berasal dari Sulawesi Utara, tolong nanti pakai bahasa Minahasa. Orang Sunda pakai bahasa Sunda. Yang dari Madura pakai bahasa Madura, kemudian orang Bugis pakai bahasa bugis. Kira-kira di antara Bapak-Ibu ada yang saling mengerti? Bahasa Indonesia itu bisa menjadi suatu alat pemahaman. Hal itu menjadi sangat



penting untuk esistensi sebuah bangsa. Ada hal yang menarik. Saya kutip dari pakar psikologi dalam buku *Sosial INTELEJEN*. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu bagian dari kita walaupun mayoritas bangsa kita tidak bangga dengan bahasa, tidak bangga dengan sastra dan budaya. Bapak-Ibu tidak perlu takut karena yang bisa melakukan perubahan-perubahan besar bukan jumlah massa atau mayoritas, melainkan kelompok kecil yang kreatif. Bapak-Ibu yang hadir di sini adalah kelompok kecil yang kreatif, bahkan Prof. Dadang ingin acara ini dimulai supaya kita juga mengubah kebiasaan dari permisif ke toleransi. Kita selama ini sering kali mengaburkan konsep toleransi dengan permisif. Permisif itu kalau ada tindakan kebiasaan yang sebenarnya tidak baik, tetapi kita lanjutkan, sedangkan toleransi itu sisinya positif. Acara sering kali kita buka setelah pesertanya banyak. Nah, itu termasuk permisif, yaitu kita tidak menghargai mereka yang di sini, tetapi justru menghargai yang terlambat. Untuk itulah, Bapak-Ibu yang kami hormati, ada satu konsep yang kita sebut dengan jalan yang tinggi, yaitu kemampuan seseorang. Ketika melintasi sesuatu di luar dunia, dia tidak menggunakan otak mamaliannya, yaitu otak belakang, tetapi dia lebih banyak menggunakan otak depannya sehingga di situ lebih dipikirkan. Orang yang terbiasa menggunakan otak depan, maka dia tidak mudah terjebak oleh berita palsu, yang sekarang lebih dikenal dengan berita hoaks. Barang kali hal ini menjadi teguran bagi kita bersama.

Kedua, orang yang mengabari itu selalu melakukan frekuensi sehingga apa yang ia katakan bukan sekadar kata-kata yang bisu, bahkan seorang pakar bahasa dari Prancis mengatakan bahwa sebuah kata yang baik, bahasa yang autentik adalah bahasa yang tidak terjebak pada omong doang atau yang aktivisme, yaitu bahasa yang digunakan hanya untuk aktivitas tanpa ada refleksi. Hakikat manusia di dalam hidup ini adalah menggunakan apa yang disebut dengan praksis kebudayaan, meminjam idealisme, yaitu manusia yang dibentuk oleh budayanya, tetapi pada saat yang bersamaan manusia juga ikut membentuk kebudayaannya. **Dalam tulisan Soekarno, *Founder Father*, kita Indonesia merdeka tahun 33 itu, (15.22) manusia sering dipikul oleh ... dia juga punya tanggung jawab untuk memikul ...** sehingga bangsa sastra dan kebudayaan tidak hanya membentuk manusia Indonesia, tetapi juga dibentuk oleh manusia Indonesia. Pertanyaan bagi kita adalah apakah para pendidik di negeri kita sudah menyadarkan akan hal itu.

Pemikiran yang erat dengan Pancasila sangat terkait dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergerakan. Yang pertama adalah konsep liberasi, yaitu membebaskan. Bahasa Indonesia bisa menjadi jembatan untuk orang yang dulunya tertekan oleh bahasa tertentu sehingga susah untuk berkomunikasi dengan suku lain. Ketika belum bisa menggunakan bahasa Indonesia pada saat kongres, yang menjadi penerjemahnya adalah orang lain. Selama dua bulan ia belajar betul tentang bahasa Indonesia dan dia membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu memang hebat. Akan tetapi, sebaliknya juga jika kita di dalam proses liberasi, manusia telah dibebaskan, tujuannya untuk berkomunikasi. Komunikasi itu memerlukan dialog dan di dalam dialog karena ingin memanusiakan manusia. Saya berikan contoh lagi untuk menjelaskan bahasa sebagai proses organisasi dalam dialog. Sepengetahuan saya, bahasa yang diajar masih kalah progresif dengan bahasa dialog di dalam komunikasi. Seseorang menghargai orang lain. Ketika kita dihargai oleh orang lain, kita harus rela rendah



hati, siap untuk menerima masukan dari orang lain. Komunikasi semacam itu memosisikan dua subjek, baik guru dan murid, dosen dan mahasiswa, pembaca dan penulis, maupun pembicara dan pendengar. Pada situasi itu terjadi proses untuk saling mengorbankan sehingga sama-sama menjadi subjeknya. Kami berharap walaupun dalam peraturannya disebut peserta didik, siswa tidak disebut sebagai peserta didik, tetapi subjek didik. Artinya, bangsa yang autentik adalah bangsa yang bisa melakukan perubahan karena bahasa tidak sekadar mendeskripsikan sebuah realitas, tetapi mengubah realitas yang kurang positif menjadi realitas yang positif.

Yang ketiga adalah transendensi. Kita tahu bahwa bahasa itu untuk melatih kita. Bapak-Ibu yang suka membaca biasanya mempunyai pemikiran yang tidak terkungkung oleh kebiasaan sehari-hari karena orang yang punya kosakata dan wacana sastra yang banyak punya peluang untuk memiliki banyak imajinasi. Di dalam proses berimajinasi itulah dia punya dimensi filologis, yaitu memikirkan masa depan yang lebih baik sehingga hidup tidak hanya untuk yang di sini, tetapi hidup juga untuk yang di sana. Artinya, masa depan itu dipikirkan. Bapak-Ibu yang terhormat, ini yang kami inginkan, usaha kita mengubah bangsa, sastra, dan budaya. Kita menjadi transportasi dari yang negatif ke positif. Kita sering kali melihat hp hanya untuk hoaks, padahal semua bisa tahu kita bisa belajar dari hp kita. Mengapa tidak sisi positif yang kita lihat? Karena bahasa Indonesia dulu adalah sebuah bahasa yang melebihi dari Belanda. Sekarang merdeka untuk apa? Untuk bangsa yang lebih maju, bangsa yang lebih berdaulat, dan seterusnya. Itu adalah kebebasan kita dan inilah yang harus kita tekankan. Di dalam Kongres Bahasa Indonesia ini, mari kita kembali pada cita-cita para pendiri bangsa bahwa kita semua tidak akan mungkin bisa memberikan sesuatu yang besar kepada orang lain jika tidak diawali dengan pikiran-pikiran yang besar. Kemudian, untuk memiliki pikiran-pikiran yang besar, ego kita harus kita minimalkan. Contoh sederhana, membangun Jakarta, termasuk Monas, Masjid Istiqlal, dan Gedung Gelora Bung Karno banyak orang yang menyebut itu dengan megalomania. Demikian pula, Pak Harto membangun Taman Mini dianggap sebuah impian yang tidak jelas, bahkan Presiden Habibie berhasil membangun PT Dirgantara untuk Indonesia itu juga dilecehkan. Demikian pula, Presiden Jokowi yang sekarang membangun infrastruktur besar selalu dicaci maki. Bapak-Ibu yang kami hormati, apa mungkin sebuah pembangunan yang besar tanpa didukung oleh pemikiran dan jiwa besar oleh rakyatnya? Saya melihat program-program besar dari pemimpin kita. Jangan-jangan ini refleksi dari ketidakpercayaan diri kita sehingga kita mengukur orientasinya hanya lima tahun ke depan bukan seratus tahun ke depan. Ini artinya jika kita ingin pembangunan bahasa kita, yaitu bagaimana realitas bahasa kita, sastra kita ini menjadi baik, kita harus mengubah mentalitas kita yang dikutip oleh Koentjaraningrat, yaitu orang yang suka *nrabas*, yaitu orang yang tidak memperhatikan kualitas sehingga kalau kita malas berpikir, bahasa Inggris langsung kita tulis menjadi bagian dari diri kita dan kadang-kadang konteksnya juga tidak tepat. Artinya, kami berharap Bapak-Ibu nanti bisa memberikan pikiran-pikiran yang cemerlang dan kreatif, yaitu bahwa bahasa Indonesia bukan bicara teknis tentang sisipan dan aturannya, melainkan ada nilai spiritual di dalam konsep bahasa dan sastra. Pancasila sebagai sebuah ide dipahami sebagai hidrastasis, yaitu elemen yang menyatukan bangsa kita. Hal itu sudah relatif berhasil walaupun akhir-akhir ini diganggu oleh hoaks dan ujaran kebencian.



Pancasila sebagai nilai bangsa yang dinamis, cita-cita ini yang relatif belum mampu kita jadikan rujukan bersama. Kami berharap bahasa Indonesia, sastra Indonesia, dan budaya bangsa Indonesia bisa hampir sama. Yang bergelut di dunia sastra jangan membuat rapor yang pesimis atau negatif. Di dalam cerita-cerita rakyat selalu ada cerita yang kalah, lalu kapan bangsa kita itu menang. Hal ini berarti bahwa sastra adalah bagian dari rekayasa sosial. Sastra tidak hanya menerjemahkan keinginan penulisnya, tetapi bagaimana penulis membawa imajinasi pada kehidupan yang lebih baik. Terakhir, bagaimana bahasa, sastra, dan kebudayaan bisa menjadi jati diri bangsa kita jika tadi di awal saya menyebutnya ada si Malin Kundang. Di dalam cerita pewayangan kita mengenal kisah Bima bisa menemukan diri setelah memasuki dirinya yang sejati, yaitu kisah Bima Suci yang dikenal juga dengan kisah Dewa Ruci. Kisahnya sepengetahuan saya di Alkitab tertulis seperti itu, di Alquran juga begitu. Jangan memimpin orang lain sebelum bisa memimpin diri sendiri. Ada pesan yang besar menurut Rasulullah saw., yaitu bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan diri sendiri dengan cara menguasai diri kita. Jika kita ingin menjadi bangsa yang besar, bukan kita mengalahkan bahasa Indonesia, melainkan kita menguasai bahasa Indonesia, sastra Indonesia, dan kebudayaan Indonesia. Potensi yang ada dalam kebudayaan kita bisa kita temukan. Jika kita bisa melakukan itu, bahasa, sastra, dan budaya akan bisa menjadi energi yang positif. Energi yang positif mampu memfungsikan harga diri kita. Hanya orang-orang yang punya harga dirilah yang memiliki prestasi. Orang yang memiliki prestasi tidak akan dituntun oleh masa kini. Teman-teman kita, adik-adik kita, yang kemarin juara olimpiade rela tidak bisa bercengkerama dengan teman dan keluarganya untuk memiliki prestasi yang baik. Jika ingin menjadikan bahasa, sastra, dan budaya kita sebagai bahasa, sastra, dan budaya yang positif, kita harus mengurangi grup-grup medsos hanya untuk sekadar bicara-bicara yang tidak penting. Kita gunakan grup medsos untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kita dan berusaha menjadikan bahasa dan sastra bangsa Indonesia lebih jaya di masa depan.





**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.  
Judul Makalah: “Bahasa, Sastra, dan Kekuatan Kultural Bangsa”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 15.45—17.45  
Moderator : Dr. Maryanto  
Pencatat : 1. Dewi Khairiyah  
2. Retno Indarwati

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Sebagai sebuah bangsa, mental inferior kita sebagai orang yang dijajah masih kuat sehingga bahasa Indonesia dianggap belum setara dengan bahasa di negara lain.
2. Bahasa Indonesia adalah bahasa pergerakan, bahasa yang dapat mengangkat harkat dan martabat manusia karena bahasa adalah struktur kognisi yang menentukan cara berpikir selain sebagai alat komunikasi.
3. Jong Java memiliki semboyan “*shakti, buddhi, bhakti*” yang bermakna jika ingin tidak terjajah lagi, harus sakti dengan TI, harus punya karakter (budi), dan berbakti pada bangsa. Paradigma ini mirip dengan teori Toynbee:
  - a) peradaban lahir dari proses tantangan dan tanggapan dan
  - b) pertumbuhan peradaban dipengaruhi determinasi diri ke dalam yang progresif.
4. Ciri-ciri proses peradaban adalah tidak mungkin sukses peradaban jika tidak punya akar budaya, yaitu nilai-nilai yang dibangun oleh nenek moyangnya.
5. Apakah rela jika bahasa Indonesia menjadi anak kedua di negeri sendiri dengan maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik? Tanpa kita sadari, penggunaan bahasa dan kebudayaan adalah masalah spiritual. Selama kita tidak memiliki kepercayaan diri, maka bahasa tidak akan kuat.
6. Konsep jalan yang tinggi adalah
  - a) merespons sesuatu tidak menggunakan otak mamalia (otak belakang), tetapi menggunakan otak depan sehingga tidak terjebak dengan berita palsu dan
  - b) selalu melakukan preferensi sehingga bahasa dan kebudayaan tidak hanya membentuk bangsa.
7. Tanah air tidak mungkin menjadi warisan yang baik jika kita belum memiliki persatuan antarsesama bangsa.
8. Yang bisa mengubah suatu bangsa bukanlah mayoritas, melainkan kelompok kecil yang kreatif.
9. Manusia dibentuk oleh kebudayaan, tetapi secara bersamaan manusia membentuk kebudayaan. Apakah pendidik kita sudah menyadari akan hal tersebut?
10. Pemikiran Pancasila
  - a) Konsep liberasi: manusia dibebaskan untuk berkomunikasi. Dengan adanya bahasa Indonesia, orang yang berbeda suku bisa berkomunikasi.



- b) Humanisasi: dalam komunikasi, orang menghargai orang lain, maka rela rendah hati dan siap menerima masukan orang lain.
- c) Transendensi: orang yang bahasa sastranya baik, memiliki imajinasi.
11. Pada Kongres Bahasa Indonesia mari kembali pada cita-cita pendiri bangsa dengan pemikiran yang besar. Untuk mendapat pemikiran yang besar, diperlukan jiwa yang besar. Sebagian besar masyarakat malas berpikir sehingga bahasa asing dibaca dan digunakan begitu saja tanpa diubah terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia.
12. Membangun bahasa, sastra, dan budaya Indonesia berarti membangun jati diri bangsa.
13. Jangan memimpin orang lain sebelum memimpin diri sendiri dengan cara menguasai diri sendiri. Oleh karena itu, jika ingin membesarkan bahasa Indonesia, kita harus menguasai bahasa Indonesia.

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Vivi Aida

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar

#### **Pertanyaan:**

Sastra adalah cerminan masyarakat, ada yang baik dan tidak baik, bagaimana hubungannya dengan Pancasila?

#### **Jawaban:**

Penulis sastra tidak sekadar menuliskan apa yang ada di dalam kehidupannya, tetapi juga imajinasinya. Jika karya sastra ingin mengamalkan nilai-nilai Pancasila, gambarkanlah nilai-nilai kebaikan. Saya suka karya sastra yang mencerahkan, artinya penulis sastra tidak sekadar mencerminkan yang ada, tetapi juga mencerminkan ideologi. Yang ditonjolkan adalah nilai kebajikan. Kekerasan di era-era kerajaan yang muncul seperti yang ditampilkan dalam karya sastra dapat diberikan argumen bahwa pada zaman dulu belum ada sistem demokrasi. Nilai-nilai Pancasila harus digali dari nilai-nilai budaya.

#### **Penanya 2**

Nama : Mahmudah

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar

#### **Pertanyaan:**

Apa yang disajikan bukanlah mengacu pada sikap bahasa, sikap bahasa sejauh ini hanya setia, bangga. Bagaimana menyikapi kembali?

#### **Jawaban:**

Kita sering memiliki pengetahuan yang cukup, tetapi tidak memiliki kelakuan/tindakan. Pancasila seharusnya tidak sekadar mitos, tetapi juga logos.

#### **Penanya 3**

Nama : Widi Suharto

Instansi : SMA Negeri 1 Tulungagung

**Pertanyaan:**

Apakah Pancasila sudah mendarah daging dalam diri masyarakat Indonesia meski selama ini tidak dijelaskan seperti yang dipaparkan?

**Jawaban:**

Kita berdialog dengan mereka. Pada dasarnya masyarakat Indonesia sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila, tetapi tidak sadar. Karena tidak ada kesadaran, nilai positif tidak muncul.

**Isu-Isu Penting:**

1. Para guru diharapkan tidak hanya mengajarkan tentang kaidah bahasa, tetapi juga nilai-nilai positif di dalam bahasa. Tokoh-tokoh dalam sastra seharusnya dibuat optimis, bukan tokoh pesimis. Sastra merupakan cerminan sosial dan budaya. Sastra tidak sekadar menerjemahkan penulis, tetapi juga harus dapat membawa pada kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, Pancasila sebagai penuntun bangsa belum dijadikan sebagai rujukan bersama.
2. Untuk menyelami dan memahami nilai-nilai Pancasila, kita harus mendalami sedalam-sedalamnya. Seyogianya, kita tidak mengambil hal-hal dari permukaan/kulitnya saja. Sesuatu tidak menjadi narasi besar bukan karena tidak mempunyai hal yang besar, tetapi mungkin karena kita kurang menggalinya.



## 2. Pemetaan dan Kajian Bahasa Dan Sastra Daerah

### PEMETAAN DAN KAJIAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

**Multamia Lauder**  
Universitas Indonesia

Saya hari ini sebetulnya tidak memberikan sesuatu yang istimewa. Saya adalah salah satu tim anggota pemetaan yang masih hidup. Anggota tim pemetaan yang lain sudah di alam keabadian. Oleh karena itu, saya ingin berbagi saja supaya kita *ora kepaten obor ngono lho*, kata orang Jawa, mengenai asal mula dan apa saja yang sudah dilakukan supaya nanti generasi muda bisa melanjutkannya. Mengingat saya juga sudah berusia senja, 53 tahun, saya berharap dengan berbagi, yang muda-muda bisa melanjutkan yang sudah dilakukan supaya pemetaan bahasa kita makin tertata dengan baik dan dapat melindungi bahasa dan sastra daerah. Banyak yang akan disampaikan kepada generasi muda karena yang sudah dilakukan merupakan pengalaman dari tahun 1991.

Saya mulai dengan warisan budaya dulu. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Ini juga yang perlu kita pahami bersama bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Kurang apa lagi? Negara kepulauan terbesar dan keanekaragamannya juga terkaya di dunia. Justru kondisi ini otomatis menumbuhkan keanekaragaman budaya karena situasi flora, fauna, dan lingkungan alamnya juga berbeda-beda sehingga bisa dibayangkan betapa kayanya kosakata bahasa daerah dengan kondisi yang unik dan khas itu. Bahasa memiliki fungsi sebagai penyimpan tata nilai budaya, termasuk etika dan moral yang tersimpan dalam berbagai bentuk kebahasaan, antara lain dalam bentuk kosakata, pantun, cerita rakyat, sastra, mitos, tradisi lisan, dan ungkapan. Semua ini tersimpan di dalam bahasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan penjaga budaya. Apabila suatu bahasa punah, pada umumnya budayanya pun akan ikut punah. Maka dari itu, keanekaragaman bahasa daerah harus dikembangkan dan dilindungi karena merupakan kekayaan budaya bangsa, bahkan kekayaan seluruh umat manusia di dunia. Hal ini merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 yang secara gamblang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Nomor dua, hal yang penting, ketika saya membuat RUU bahasa daerah bersama Mas Wisnu, yang dituntut oleh DPD itu adalah dimunculkannya penghormatan dan pemeliharaan bahasa daerah oleh negara. Karena selama ini tidak dimunculkan bahwa negara itu harus menghormati dan memelihara bahasa daerah, kadang-kadang bahasa daerah itu ada, syukur. Tidak ada bahasa daerah juga tidak apa. Hal itu tidak boleh terjadi. Dengan adanya jaminan bahwa negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, semua bahasa daerah yang ada di Indonesia adalah kekayaan budaya nasional yang perlu dilindungi. Informasi kebahasaan itu harus komprehensif karena komprehensif itu tidak hanya bahasa-bahasa yang besar, tetapi juga bahasa-bahasa pencilan, bahasa-bahasa suku terasing. Hal ini belum tersentuh, belum ditemukan sampai detik ini. Belum ditemukan satu penelitian pun yang mendeskripsikan lokasi-lokasi suku terasing yang ada di seluruh Indonesia secara



lengkap dan komprehensif. Penjaringan data di lapangan dapat membantu kelacakan mereka dengan menambah jumlah desa sebagai titik pengamatan. Kompleksitas bahasa Indonesia jika ditangani secara sporadis, semua bahasa daerah yang semula tergolong sebagai bahasa yang terancam punah akan dengan cepat mengalami proses menuju ke bahasa sekarat sehingga menuju ke kematian bahasa dalam berbagai gradasi. Ini merupakan hal yang serius. Orang akan menganggap hal ini berlebihan. Keadaannya serius, menuju ke kematian, paling tidak sekarat. Untuk itu, perlu dirancang kuesioner baku. Pada tahun 1991 satu buku kuesioner untuk satu desa dibuat dengan sedemikian rupa sehingga peneliti harus mencatat data dengan aksara fonetik dan merekam sejarah desa dan folklor dengan bahasa yang digunakan di desa yang diteliti. Kuesioner baku terdiri atas 1991 pertanyaan yang terdiri atas kosakata dasar Swadesh, kosakata budaya dasar, frasa, dan kalimat sederhana.

Lalu, harus ada orang yang turun ke lapangan untuk menjaring data. Awalnya para penjaring data yang dipilih adalah para guru bahasa di lokasi pengamatan yang berlatar pendidikan sarjana bahasa. Mereka merupakan sosok yang mengenal wilayahnya dengan baik. Mereka diberi pelatihan khusus mengenai tata cara wawancara dan cara menuliskan data di lapangan serta menuliskan data dengan aksara fonetik. Dengan demikian, harus ada pelatihan. Bidang linguistik itu, historis komparatif, dipimpin almarhum Doktor Goris Keraf, sedangkan dialektologi dipimpin almarhum Doktor Hayatul Khoeri. Pelatihan penjaringan data untuk para guru sudah dilakukan sejak tahun 1992 hingga 2006. Semua datanya ada. Selanjutnya, mulai tahun 2007 penjaringan data dilakukan oleh para staf Pusat Bahasa, balai bahasa, serta kantor bahasa. Apabila diperlukan, masih dimungkinkan untuk melibatkan peneliti dari pihak universitas setempat. Sumber utama pemberi data tentunya adalah informan. Namun, untuk menghindari data yang bersifat idiolek, jumlah informan minimal berjumlah tiga orang. Satu orang merupakan informan utama, lalu dua orang lagi merupakan informan pendamping. Sumber utama pemberi data yang diharapkan adalah sosok informan yang memenuhi kriteria, yaitu penduduk asli, berusia sekitar 40 tahun, memiliki alat ucapan yang sempurna, dan sebagainya.

Desa sebagai lokasi penelitian itu disebut sebagai pengamatan. Mengapa? Karena saat dipetakan desa itu direpresentasikan sebagai sebuah titik di peta bahasa, titik dari sebuah wilayah pengamatan. Jumlah desa yang diteliti tidak dapat diseragamkan, bergantung luas wilayah pengamatan dan kondisi kebahasaannya. Wilayah heterogen membutuhkan titik pengamatan yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah homogen. Pemilihan desa didasarkan tiga sifat desa, yaitu desa yang tua, yang sukar dihubungi, dan yang mudah dihubungi dengan alasan yang sudah tercantum.

Penjaringan data dilakukan setelah para guru diberi pelatihan. Mereka turun ke setiap provinsi. Penjaringan data itu dimulai tahun 1992, yaitu mula-mula di Provinsi Timor Timur sebelum merdeka, lalu sampai tahun berikutnya, yaitu tahun 1997. Saat krisis moneter, penjaringan data itu terpaksa dihentikan. Baru dilakukan penjaringan data lagi pada tahun 2006. Cukup lama terhenti proses pemetaan ini.

Penjaringan data belum tuntas karena dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 itu mereka tidak bisa turun ke lapangan. Pengelolaan data tidak akan mudah karena data yang berlimpah dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada



pangkalan data. Untuk membuat pangkalan data, kita perlu bantuan tim Politeknik ITB. Mereka membuat pangkalan data, bahkan membuat aksara fonetik karena pada dasarnya pada zaman dulu belum ada aksara fonetik yang *online* tinggal diklik. Aksara fonetik ini diprogram dan didesain sendiri per huruf. Lalu, pengentrian data dimulai tahun 1994 setelah program itu jadi. Akan tetapi, mereka juga perlu diberi pelatihan agar hasil pengentrian mereka itu sama persis dengan hasil pengentrian yang ada di buku kuesioner dari setiap desa. Hasil itu langsung diverifikasi oleh para pakar yang sudah ada di alam keabadian. Mereka memeriksa berulang-ulang sampai hasil entrian identik dengan data dari lapangan. Lalu, pengolahannya seperti apa? Setelah dientri, pengolahannya langsung terbagi dua, yaitu secara linguistik historis komparatif dan dialektologi. Secara linguistik historis komparatif, tentu pengolahan data berdasarkan konseptornya. Kemudian, komprehensif ini ditelusuri serta dilakukan penghitungan leksikostatistik untuk menekankan derajat kesamaan atau kemiripan. Secara dialektologi, pengolahan data diawali konsep etimon. Selanjutnya, dibuat peta bahasa, satu peta untuk satu glosa, frasa, atau kalimat. Lalu, dibuat berkas isofon dan isoglosnya serta penghitungan dialektometri yang menekankan pada derajat perbedaan.

Dengan demikian, ada perbedaan antara linguistik historis komparatif dan dialektologi. Pada akhir pemetaan diharapkan pemetaan itu akan dipaparkan berdasarkan delapan wilayah pemaparan, mulai dari Sumatra sampai dengan Papua. Hingga Oktober 2018 Badan Bahasa telah mendeteksi 668 bahasa daerah, belum termasuk dialek atau subdialeknya. Mengingat banyaknya bahasa yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, hingga saat ini belum tuntas identifikasinya. Jadi, bahasa yang ada di wilayah tersebut bukan tidak diteliti, melainkan belum karena bahasanya banyak. Proses penjarangan data, pengelolaan data, dan pengolahan data sampai sekarang masih berlangsung. Hasil pemetaan itu dapat dilihat di laman Badan Bahasa.

Mengenai masalah kerapuhan eksistensi warisan budaya kita, jika kita cek kepada etnolog yang bernama Louis, diperkirakan di seluruh Indonesia terdapat 266 bahasa berstatus lemah dan 75 bahasa berstatus sekarat. Mungkin kondisi kebahasaan yang buruk ini belum disadari oleh kita. Bayangkan lebih dari 300 bahasa berstatus lemah dan sekarat. Sehubungan dengan hal itu, perlu direnungkan kembali mengapa minim pengetahuan kita tentang budaya nasional sehingga kurang menyadari eksistensi kerapuhan warisan budaya kita. Pada umumnya, jika ditanya bahasa daerah kita ada berapa, kita tidak tahu. Lalu, jika ditanya bahasa daerahnya apa saja, kita sebut bahasa daerah yang itu-itu lagi. Bahasa yang disebut itu adalah bahasa yang penuturnya di atas satu juta, sedangkan bahasa yang di bawah satu juta tidak ada yang bisa menyebutkan dengan benar. Bahasa yang berstatus lemah dan sekarat bergantung pada minimnya jumlah penutur. Selain itu, bahasa tersebut tidak memiliki struktur tulisan. Kelangsungan hidup bahasa-bahasa ini bergantung pada tradisi lisan antargenerasi. Jika bahasa-bahasa ini tidak segera dibantu, eksistensi budaya mereka akan sangat sulit dipertahankan.

Drestal berpendapat bahwa bahasa berpenutur sekurang-kurangnya 1.000 orang dapat digolongkan bahasa yang masih memiliki daya hidup dan masih dimungkinkan untuk direvitalisasi. Selain Undang-Undang Dasar 1945, kita punya undang-undang tambahan pada tahun 2017, yaitu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dalam undang-undang tersebut tertulis bahwa pemajuan



kebudayaan berfungsi untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, mengembangkan keragaman budaya, dan sebagainya. Objek pemajuan kebudayaan Indonesia adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, pengetahuan tradisi, teknologi tradisional, bahasa, permainan rakyat, dan permainan tradisional. Tertulis dengan jelas dalam undang-undang tersebut bahwa bahasa dan sastra termasuk objek pemajuan kebudayaan. Hal ini merupakan program Badan Bahasa untuk perlindungan bahasa dan sastra. Kita melihat bahwa Badan Bahasa sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyikapi kondisi kebahasaan kita yang rapuh. Kita bisa lihat bahwa program utamanya diawali dengan pemetaan bahasa, lalu kajian vitalitas bahasa. Jika vitalitas bahasa sudah jelas, akan dilakukan konservasi atau revitalisasi sehingga pada akhirnya bisa dilakukan registrasi bahasa. Dengan demikian, setiap bahasa itu nanti jelas statusnya.

Dalam hal ini yang ditekankan adalah kepunahan bahasa akan berdampak pada sastra. Bahasa memiliki fungsi sebagai penyimpan tata nilai budaya, termasuk etika dan moral yang tersimpan dalam berbagai bentuk kebahasaan, antara lain dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, sastra, legenda, dan tradisi lisan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan penjaga budaya. Apabila sebuah bahasa punah, pada umumnya budayanya pun akan ikut punah. Oleh karena itu, menggunakan bahasa daerah berarti melindungi vitalitas bahasa sekaligus melindungi vitalitas sastra.

Mengingat bahasa dan sastra itu menurut saya sejiwa raga, idealnya data bahasa dan sastra hendaknya selaras. Alangkah idealnya jika bisa dirancang pemetaan sastra daerah di seluruh Indonesia yang setara dengan kekerabatan pemetaan bahasa-bahasa di seluruh Indonesia. Alangkah idealnya jika di setiap titik pengamatan bahasa juga dilakukan pengamatan sastranya. Hal ini belum dilakukan. Sebagian sudah dilakukan, sebagian tidak dilakukan, jadi masih belum konsisten.

Menurut hasil pemetaan bahasa di Indonesia tahun 2018, tadi sudah disampaikan bahwa terdeteksi 668 bahasa daerah. Dengan demikian, diharapkan minimal ada 668 sastra daerah yang terdokumentasikan. Badan Bahasa juga sudah berusaha keras untuk mulai melakukan kajian vitalitas bahasa sejak tahun 2011. Namun, dari 668 bahasa daerah, baru dilakukan kajian vitalitas terhadap 71 bahasa. Dari 71 bahasa itu, 29 bahasa terdeteksi aman, yaitu Aceh, Jawa, Bali, Madura, dan lainnya. Lalu, ada 16 bahasa yang rentan, yaitu stabil untuk sementara waktu, tetapi terancam punah. Ada 2 bahasa yang menyusut penuturnya, 9 bahasa yang terancam punah, dan 4 bahasa yang sangat terancam punah, serta 11 bahasa yang sudah punah. Data ini adalah hasil terbaru tentang vitalitas bahasa. Sekarang bagaimana dengan perlindungan bahasa dan sastra? Ini harus sudah menjadi satu kesatuan, tidak bisa bahasa sendiri dan sastra sendiri karena itu sejiwa seraga sehingga harus jadi satu. Pelindungan bahasa dapat kita lihat dari kajian vitalitas bahasa. Kajian yang sudah dilakukan adalah kajian vitalitas bahasa Kadal, Bengkulu, dan Marsela Timur. Revitalisasinya terhadap bahasa Enggano, Redebang, Budong-budong, dan sebagainya. Pelindungan sastra juga sudah dilakukan, tetapi belum banyak, yaitu dolo-dolo di NTT, wayang krucil di Jawa Timur, dan sebagainya. Jadi, masih banyak sekali tugas kita.

Registrasi bahasa dan sastra adalah hal yang sangat penting. Jika mau membongkar gudang bahasa, kita temukan sangat banyak kajian sastra yang dilakukan, tetapi sebagian besar belum terintegrasi dan teregistrasi. Sangat



disayangkan, pekerjaan yang sudah begitu bagus dikerjakan dengan susah payah jadi seperti tercecer. Sekarang ini masanya kita mulai mengumpulkannya lagi, bongkar gudang itu, cek lagi data-data, mana yang sudah diteliti mana yang belum. Jadi, kita harus menginventarisasi dulu kajian sastra yang sudah dilakukan dan yang belum. Kita cek dengan titik-titik pengamatan bahasa, lalu akan mendokumentasi sastranya sebelum bahasanya itu punah. Hal ini menjadi penting untuk teman-teman pengkaji sastra. Jika punah, itu akan berdampak pada punahnya sastra, tradisi lisan. Kita juga harus melakukan penuntasan pemetaan bahasa, perlindungan bahasa dan sastra, serta sensus bahasa. Bahasa daerah merupakan pintu masuk untuk mengekspresikan nilai, norma, aturan, adat kebiasaan, dan kearifan lokal yang memelihara budaya dan lingkungan hidup agar mendapatkan informasi yang komprehensif tentang keadaan kebahasaan di Indonesia. Maka dari itu, kita perlu menuntaskan pemetaan bahasa di Indonesia dan meningkatkan kajian vitalitas bahasa, konservasi bahasa dan sastra, revitalisasi bahasa dan sastra, serta registrasi bahasa dan sastra.

Selain itu, diusulkan sensus bahasa itu perlu untuk dilakukan di setiap provinsi untuk memutakhirkan data jumlah penutur agar dapat ditindaklanjuti melalui konservasi atau revitalisasi. Sejujurnya, jika kita ke *website* etnolog itu, datanya ada banyak. Akan tetapi, jika dilihat lebih lanjut, penelitian itu dilakukan pada tahun 1980-an dan 1970-an, itu sudah kedaluwarsa semua. Dengan begitu, harus segera kita lakukan sensus bahasa sehingga jika hendak mengecek bahasa daerah di Indonesia, orang akan datang ke Badan Bahasa, bukan ke etnolog. Data kita lebih mutakhir dari data mereka. Data sementara yang terhimpun saat ini baru berasal dari 2.468 titik pengamatan. Data ini ditemukan pada tahun 2018, belum mencapai 7.000 sebagaimana yang dulu dicanangkan oleh almarhum Goris Keraf dan almarhum Prof. Hayatul Khaeri. Belum semua bahasa yang dituturkan di Indonesia dapat teridentifikasi sehingga bahasa suku terpencil, suku terasing, dan imigran belum terekam secara komprehensif. Berdasarkan kuesioner baku, terdapat 1991 kalimat, tetapi data yang dianalisis baru bertumpu pada 400 tanya yang berupa kosakata dasar sebanyak 200 glosa serta kosakata budaya dasar sebanyak 200 glosa. Sebagai langkah awal, analisis itu diutamakan pada tataran fonologi dan leksikon, bukan pada tataran frasa dan kalimat. Hal ini dilaksanakan karena secara linguistik hampir semua bahasa di dunia cenderung berbeda pada tataran fonologi dan leksikonnya. Peta bahasa yang disajikan belum dipadukan dengan informasi wilayah penggunaan bahasanya berdasarkan berkas isoglos dan isofon.

Analisis linguistik historis komparatif dapat dilaksanakan setelah pemetaan bahasa karena peta bahasa justru mempermudah rekonstruksi bahasa proto dari bahasa-bahasa di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, sampai saat ini pengelompokan bahasa-bahasa nusantara perlu dianalisis secara lebih mendalam karena kemiripan kata-kata kerabat di antara bahasa-bahasa itu berkisar antara 30% sampai dengan 40% yang berarti lebih susah untuk menentukan bahasa mana lebih dekat ke bahasa lain. Ini menurut Profesor Keraf. Dengan demikian, kekerabatan bahasa berdasarkan korespondensi bunyi dan penghitungan leksikostatistik akan dilakukan dan disampaikan pada tahap berikutnya. Jadi, belum sepenuhnya terpadu antara perlindungan bahasa dan sastra sehingga perlu koordinasi lebih lanjut.





Sebagai penutup, bangsa kita merupakan bangsa yang multikultural dan multilingual. Dengan demikian, semangat menghargai keanekaragaman bahasa dan budaya harus terus didengarkan. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah daerah mau atau tidak mau wajib ikut bertanggung jawab dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah. Mereka juga berkewajiban untuk melaporkan hasil upaya tersebut dan hasil evaluasinya kepada Menteri Dalam Negeri. Teman-teman di balai/kantor bahasa di provinsi bekerja sama dengan pemda karena pemda punya kewajiban seperti itu. Semua balai/kantor bahasa di seluruh Indonesia dapat membantu melakukan pengecekan dan pengecekan ulang keselarasan antara bahasa dan sastra yang diteliti. Keberagaman budaya daerah merupakan kekayaan bangsa yang sangat diperlukan dalam dinamika perkembangan dunia sehingga Badan Bahasa sudah tepat melakukan program pengembangan bahasa dan sastra yang strategis untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbudaya, berdikari, dan berkepribadian. Besar harapan saya perbedaan suara atau pendapat yang muncul sebagai konsekuensi keragaman itu dapat lebih dipahami dan dapat ditangani dengan lebih arif untuk menuju Indonesia baru yang lebih sejahtera.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Prof. Dr. Multamia Lauder  
Judul Makalah: “Pemetaan dan Kajian Bahasa dan Sastra Daerah”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 13.45—15.15  
Moderator : Drs. Wisnu Sasangka, M.Hum.  
Pencatat : 1. Purwaningsih  
              2. Ferdinandus Moses  
              3. Kunkun Purwati

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Bahasa memiliki salah satu fungsi sebagai penyimpan tata nilai budaya, termasuk etika dan moral yang tersimpan dalam berbagai bentuk kebahasaan, antara lain dalam bentuk kosakata, pantun, cerita rakyat, sastra, mitos, legenda, tradisi lisan, dan ungkapan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan penjaga budaya. Apabila sebuah bahasa punah, pada umumnya budayanya pun akan ikut punah.
2. Dengan adanya undang-undang yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut, semua bahasa daerah yang berada di Indonesia adalah kekayaan budaya nasional yang perlu dilindungi.
3. Kompleksitas situasi kebahasaan di Indonesia jika ditangani secara sporadis, semua bahasa daerah yang semula tergolong bahasa yang terancam punah akan dengan cepat mengalami proses menuju ke bahasa sekarat (*moribund language*) hingga menuju ke kematian bahasa (*language death*) dalam berbagai gradasi.
4. Diperkirakan di seluruh Indonesia terdapat 266 bahasa berstatus lemah dan 75 bahasa berstatus sekarat (Lewis et al., 2015). Mungkin kondisi kebahasaan yang buruk ini belum sepenuhnya disadari oleh kita. Sehubungan dengan hal itu, perlu direnungkan kembali betapa minimnya pengetahuan kita mengenai kekayaan budaya nasional sehingga kurang menyadari kerapuhan eksistensi warisan budaya kita.
5. Bahasa-bahasa yang berstatus lemah dan sekarat cenderung minim jumlah penuturnya dan tidak memiliki sistem tulisan. Kelangsungan hidup bahasa-bahasa itu sangat bergantung pada transmisi lisan antargenerasi. Apabila bahasa-bahasa itu tidak segera dibantu, eksistensi budaya mereka akan sangat sulit untuk dipertahankan.
6. Undang-undang baru berkaitan dengan bahasa dan budaya, yaitu UU Pemajuan Kebudayaan RI No. 5 Tahun 2017.
7. Kepunahan bahasa berdampak pada kepunahan sastra atau budaya. Melindungi bahasa berarti melindungi budaya dan sastra.
8. Mengingat bahasa dan sastra bagaikan sejiwa-raga, idealnya data bahasa dan sastra selaras. Alangkah idealnya jika dapat dirancang penelitian pemetaan sastra daerah di seluruh Indonesia yang setara dengan penelitian kekerabatan dan pemetaan bahasa-bahasa daerah di seluruh Indonesia. Alangkah idealnya



jika di setiap titik pengamatan bahasa juga dilakukan pengamatan mengenai sastranya.

9. Badan Bahasa sudah memiliki data atau dokumentasi bahasa dan sastra yang luar biasa banyak. Akan tetapi, data tersebut belum dimasukkan dalam daftar registrasi.
10. Pelindungan bahasa dan sastra belum sepenuhnya terpadu. Perlu koordinasi lebih lanjut.

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Salim

Instansi : Kantor Bahasa NTT

#### **Pertanyaan:**

1. Apakah ada konvensi untuk penamaan isolek baru?
2. Apakah bahasa imigran dapat disebut sebagai bahasa sendiri seperti bahasa Bajo?
3. Penyebutan bahasa itu berdasarkan apa?

#### **Jawaban:**

Penamaan isolek itu tidak menjadi masalah menyamping ia masih isolek. Nama bahasa itu berpulang pada penuturnya yang disebut *indonem*. Namun, ada pula penutur yang tidak memberikan nama dan nama tersebut diberikan orang lain yang disebut *eksonem*. Pelacakan itu memang harus dilakukan dengan sabar. Selain itu, diperlukan penelusuran sejarah. Penamaan berdasarkan penuturan penduduk belum tentu sesuai dengan hasil penelitian linguistik. Harus bisa dipisahkan pengakuan penduduk sebagai jati diri atau hasil penelitian secara linguistik. Yang dimaksud dengan bahasa imigran itu adalah bahasa India, Cina, dan Arab yang ratusan tahun tinggal di Indonesia dan sudah bercampur dengan bahasa lokal.

#### **Penanya 2**

Nama : Kusnisastra

Instansi: Universitas Andalas, Padang

#### **Pertanyaan:**

1. Apakah ada pemetaan di kalangan dialektolog tentang jumlah dialektolog di Indonesia?
2. Jika ada pemetaan sastra, mungkinkah akan muncul dialeksastra?
3. Tidak banyak mahasiswa yang ingin menggeluti penelitian dialektologi ini?

#### **Jawaban:**

Sumber daya manusia dialektolog memang sangat sedikit karena menjadi dialektolog harus benar-benar mau turun ke lapangan ke pelosok desa, sedangkan kebutuhan ahli dialektologi sangat diperlukan untuk menangani bahasa-bahasa Indonesia yang bertebaran di nusantara. Badan Bahasa harus mengambil tempat dalam persoalan minimnya tenaga dialektolog.



**Penanya 3**

Nama : Erlinggar

Instansi : Universitas Sriwijaya

**Pertanyaan:**

Saya sedang melakukan penelitian tentang dialektologi yang dibiayai oleh Dikti dan dalam penelitian itu diharapkan ada produk yang bisa saya sampaikan. Dapatkah Ibu Multamia memberikan saran bagaimana penelitian dialektologi itu juga dapat menghasilkan produk selain hasil penelitian dialektologi tersebut?

**Jawaban:**

Produk itu memang tidak mudah. Selain melihat bahasa yang ada di wilayah itu, bisa juga dilakukan eksplorasi terhadap produk atau potensi dari daerah itu seperti kerajinan wilayah tersebut. Ibu juga dapat membuat satu glosarium yang terkait dengan budaya yang ada di wilayah tempat penelitian Ibu.



### 3. Pengelolaan Bahasa dan Sastra Daerah

#### PENGLOLAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

**Pudentia M.P.S.S.**  
Universitas Indonesia

Berkaitan dengan yang saya lakukan selama lebih kurang 25 tahun belakangan ini, saya tidak pernah beranjak keluar dari tradisi lisan sehingga mungkin lebih baik jika saya mengambil contoh-contoh dari ranah itu. Dengan demikian, pengelolaan bahasa dan sastra pada pembahasan ini dalam pengertian pengelolaan tradisi lisan sebagai warisan budaya. Hal ini membawa pemahaman tersendiri mengapa itu dimasukkan sebagai warisan budaya. Instrumen legal dan dasar-dasarnya diperoleh dari konferensi UNESCO 2003, Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, dan semua penelitian-penelitian yang sudah dihasilkan serta konferensi-konferensi internasional yang sudah menetapkan dan merumuskan bahwa tradisi lisan memang memiliki fungsi penting sebagai salah satu kekuatan kultural yang membangun karakter bangsa. Dengan demikian, kearifan lokal dan sebagainya itu merupakan sistem kognisi dalam masyarakat. Pengobatan dan macam-macam itu berupa pengetahuan, tetapi kemudian dengan kajian tradisi lisan, pengetahuan itu kita ubah menjadi ilmu pengetahuan melalui suatu proses. Dapat dikatakan bahwa tradisi lisan bukan sekadar pengetahuan, melainkan juga menjadi ilmu pengetahuan.

Kita melihat bahwa adanya fungsi yang tidak berganti atau tetap, tetapi dengan konsekuensi orang tidak suka lagi sehingga menyebabkan dinamika dalam tradisi. Hilangnya suatu tradisi bisa saja bersamaan dengan hilangnya penutur atau sebaliknya, hilangnya penutur menyebabkan hilangnya tradisi yang disampaikannya apabila pengetahuan-pengetahuan yang ada itu tidak dijadikan ilmu pengetahuan dan tidak ada pewarisan yang baik. Yang menjadi ancaman bagi keberadaan tradisi lisan adalah fungsi yang berbeda dan hilangnya tradisi bersama dengan hilangnya penutur berbagai kebijakan. Berbagai kebijakan, aturan, dan kurangnya pemahaman serta pengalaman para pemangku kepentingan sering kali juga akan menghabisi tradisi itu. Demikian pula adanya *culture blind spot* yang artinya bahwa seorang anak bisa tumbuh tanpa pengetahuan budaya sama sekali. Seorang anak langsung berbahasa Indonesia, masuk ke masa dan alam industri sekarang sehingga tidak mengenal budayanya. Hal itu juga menjadi ancaman. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah keengganan menggunakan bahasa daerah, termasuk menjayakan tradisinya karena dianggap kurang bergensi.

Ada catatan khusus mengenai Indonesia. Pada tahun 2010 UNESCO menyatakan simpulan bahwa Indonesia kehilangan tradisi itu. Selain itu, alam lingkungan yang hilang atau rusak juga menyebabkan hilangnya tradisi lisan. Pengelolaan bahasa dan sastra daerah harus dilakukan karena menjadi ketahanan bahasa dan sastra daerah. Pada akhirnya ketahanan bahasa dan sastra akan menjadi ketahanan warisan budaya. Kita akan berfokus pada pengelolaan sehingga tidak diuraikan khusus mengenai *culture heritage* atau apa yang dimaksud dengan warisan budaya. Mengapa ini harus dilakukan? Dengan pengelolaan itu, ada ketahanan budaya sebagai warisan budaya yang akan memberi kontribusi kepada Indonesia pada peradaban dunia. Bahasa, sastra, dan



tradisi yang ada itu merupakan pengayaan kemanusiaan. Hilangnya satu bahasa merupakan pemiskinan kemanusiaan. Menurut Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, ada empat hal, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, yang dimaksudkan untuk pelestarian warisan kebudayaan. Karena fokusnya pada warisan budaya, hal itu menunjukkan bahwa betapa berharganya warisan budaya.

Tidak bisa dilupakan dan tidak bisa diabaikan perlunya peningkatan kesejahteraan rakyat karena kebudayaan tanpa peningkatan kesejahteraan juga tidak akan berjaya. Orang berbudaya, tetapi menjadi miskin, tentu bukan itu maksudnya. Hilangnya atau berkurangnya keragaman alam budaya otomatis akan menyebabkan juga hilangnya keragaman tradisi. Sebaliknya, keragaman itu ditentukan oleh keragaman alam lingkungan dan sekitarnya. Keragaman itu pun mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan citra Indonesia. Jati diri bangsa dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya Indonesia dianggap sesuatu yang klise.

Berkaitan dengan bahasa dan sastra daerah dalam konteks tradisi lisan sebagai warisan budaya seperti yang telah disampaikan, pengelolaannya mencakup empat hal. Pada kolom perlindungan kita akan melakukan inventarisasi pencatatan dokumentasi dan pemutakhiran data. Pada tahap inilah siapa pun yang bergerak di berbagai daerah bisa mengusulkan kepada kementerian warisan-warisan budaya yang dicatat. Sekarang sudah ada 8.000-an yang tercatat secara resmi di kementerian. Tahap awal kemampuan seseorang untuk menjadi pengelola tradisi lisan (mengelola bahasa dan sastranya) adalah melakukan inventarisasi dengan format yang perlu dipahami.

Berikutnya adalah pengamanan, yaitu pemutakhiran data secara berkesinambungan dan ada proses pewarisan serta nominasi ke UNESCO. Tidak semua warisan budaya harus kita berikan sebagai nominasi ke UNESCO, tetapi salah satu tujuannya adalah untuk nominasi ke UNESCO agar dapat menjadi warisan dunia. Kemudian, ada pemeliharaannya. Hal ini masih termasuk dalam konteks perlindungan, yaitu menjaga nilai keluhuran dan kearifan tradisi dalam kehidupan sehari-hari serta menghidupkan ekosistem kebudayaan. Ekosistem yang dimaksud adalah komunitas peneliti dan alam yang harus tetap terjaga. Menjaga, memelihara, dan melindungi satu tradisi tidak berarti hanya melindungi tradisinya saja. Komunitasnya juga harus dilindungi. Jika tidak dilindungi, institusi pranata budayanya juga akan habis. Sebaliknya juga, misalnya, mantra-mantra memanggil ikan di Wakatobi, jika kita tidak memelihara lautnya, mantra itu juga akan hilang. Seperti itu maksudnya.

Kemudian, ada penyelamatan. Yang dilakukan adalah revitalisasi, repatriasi, dan/atau restorasi. Yang terakhir adalah publikasi, yang masuk dalam perlindungan paling awal. Berikutnya, pada ranah pengembangan kita menghadirkan ekosistem kebudayaan. Kita menciptakan dan mengadvokasi bahwa ekosistem kebudayaan itu harus terjaga agar tradisi bisa terus berlangsung. Kemudian, kita tingkatkan penyebarluasan tradisi, pengayaan keberagaman tradisi, dan pengkajian tradisi. Jadi, seperti tahun ini kita memasukkan pantun, maka pertanyaan UNESCO adalah apa keragaman pantunnya itu, apakah pantunnya hanya satu sampiran isi dalam bahasa Melayu? Kita menggambarkan bahwa pantun itu ada juga dalam bahasa Jawa, yaitu parikan; dalam bahasa Sunda, yaitu sindiran; dalam bahasa Sulawesi Tenggara, yaitu kabanti, batik-batik, dan pasayang-sayang; serta ada dari



Selayar dan Bidik. Dengan demikian, keberagaman adalah yang paling penting, itulah kata kuncinya.

Sebagai contoh, ada tari lariani dan tari saman dari Gayo luwes yang sudah masuk dalam warisan dunia UNESCO. Ada juga pinisi yang baru tahun lalu ditetapkan. Keistimewaan tari lariani adalah ketika ada penari, paling tidak ada dua belas penari (harus masih gadis), yang menari dalam enam bahasa dan nyanyiannya itu jika lengkap ada tiga puluh nyanyian dari malam sampai pagi. Mengapa bisa enam bahasa? Karena ini adalah tari persembahan untuk Sultan Buton pada waktu menerima tamu. Enam bahasa itu adalah bahasa Murio yang merupakan bahasa asli Buton, bahasa Kaledupa karena lariani berasal dari Kaledupa, bahasa Ara, bahasa Wulio, bahasa Maluku, dan bahasa Bugis. Bisa dipahami ada Bugis dan Maluku karena sejarah.

Tradisi lisan itu memang merupakan multidisiplin, tidak sastra saja. Hal ini membuktikan adanya kaitan dengan sejarah lokal dan sejarah nasional. Kekuasaan Sulawesi Tenggara pada saat itu berada di Wajo, di Luwu, ada Kesultanan Bugis, Makassar, lalu ada Ternate dan Tidore. Hal ini melahirkan tarian itu. Keistimewaannya adalah nyanyian dalam enam bahasa, tarian oleh dua belas gadis remaja, berasal dari abad ke-17, dan mempunyai kearifan lokal. Tentu saja yang paling penting adalah tautan sejarah yang panjang mengenai kehadiran lariani. Tari saman dari Gayo Luwes yang sudah ditetapkan UNESCO tahun 2011 berasal dari abad ke-14 dan awalnya merupakan sarana untuk berdakwah. Saman ditarikan oleh laki-laki sebanyak tujuh belas penari. Jadi, kurang tepat sebetulnya jika saman itu diajarkan di sekolah-sekolah.

Pinisi adalah salah satu contoh yang tadi disampaikan mengenai bagaimana pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Pengetahuan tradisional pinisi berasal dari abad ke-14. Keahlian membuat perahu itu kompatibel dengan teknologi perahu yang ada di Jerman. Mitologinya, dulu ada kapal yang dinaiki Sawerigading, tokoh utama I La Galigo, untuk meminang I We Cudai di negeri Tiongkok. Di dalam perjalanan Sawerigading diterpa badai, lalu pecah tiga kapalnya, pertama di Ara, kedua di Tanah Beru, dan ketiga di Bira. Yang di Ara itu adalah orang yang membuat lunas rangka awal perahu. Yang di Tanah Beru adalah orang yang merakit perahu, sedangkan yang di Bira adalah orang yang melancarkan perahu itu memakai upacara tertentu ke laut. Oleh karena itu, sampai sekarang dapat dikatakan pembuat perahu itu harus ada tiga, yaitu orang Ara, orang Tanah Beru, dan orang Bira. Parikalopi atau tokohnya itu berasal dari Bira. Ada istilah-istilah seperti parikalopi, upacara kapalisili, yaitu upacara tolak bala sebelum membuat perahu, lalu ada amosh, yaitu upacara sebelum menyeberangkan perahu. Istilah ini hilang dalam kosakata kita, hilang juga pengetahuan-pengetahuan mengenai itu. Oleh karena itu, pengetahuan-pengetahuan ini sangat berharga untuk kemanusiaan. Ada SMK Perkapalan Bulukumba yang mengadopsi pengetahuan-pengetahuan dari tradisi pembuatan perahu yang dinaikkan menjadi ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari oleh siapa pun. Hanya rohnya mungkin susah untuk diwariskan.

Bagaimana situasi terkini? Jumlah warisan budaya yang tadi disampaikan mendekati 8.000-an dan yang sudah ditetapkan ada 822 karya budaya. Jumlah bahasa daerah yang terdaftar di UNESCO tahun 2010 adalah 135 dalam kategori punah, kritis, terancam punah, dan hampir terancam punah. Dengan demikian,



jumlah sastra dalam DBTB belum terdeteksi. Kita punya catatan, tetapi pemetaan dan deteksi dokumentasi belum ada. Itu baru pada bahasa.

Kemudian, yang kedua, pemetaan bahasa sudah ada. Pemetaan dalam arti dokumentasi sastra atau warisan budaya ini belum memadai. Sistem pewarisan secara tradisional dan akademik perlu disegerakan. Artinya, jika tradisional itu dari datuk ke cucu dan dari orang tua ke anak, yang akademis melalui pelatihan atau melalui dunia pendidikan, perguruan tinggi.

Para penutur yang tadi sudah mulai berkurang belum tergantikan. Jumlah peneliti atau pengkaji belum memadai dan diperlukan satu langkah yang sangat spesifik, yaitu materi pelajaran bahasa dan sastra juga perlu dievaluasi sesegera mungkin karena dalam catatan UNESCO dan beberapa peneliti asing di Indonesia dikatakan penelitian kita sangat kurang dan kita kurang memberi tempat pada bahasa dan sastra daerah. Karena apa? Karena kita hanya selalu menjayakan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia sehingga seakan-akan bahasa dan sastra daerah itu dianggap sebagai sesuatu yang hanya akan memperkaya bahasa Indonesia atau kebudayaan Indonesia. Menjadikan bahasa dan sastra daerah sebagai suatu bagian dari keindonesiaan untuk kejayaan Indonesia belum dilakukan secara serius dengan satu metode, pemikiran, dan *grand design* yang tepat. Kajian BPTPI yang dilakukan di lima universitas itu sudah mencapai 200-an, tetapi masih belum bisa menjawab sebagian yang sudah disampaikan tadi karena *grand design*-nya perlu dibuat secara serius.

Kemudian, ada satu yang harus dihadapi. Ada kekayaan budaya daerah di wilayah perbatasan yang menjadi warisan budaya tak benda. Berkaitan dengan hal itu, klaim dari negara lain bisa dengan mudah dilakukan bukan karena migrasi orang-orang ke Johor, misalnya, tetapi karena mereka memberikan perhatian lebih pada budaya itu dibandingkan kita. Otomatis mereka lebih menikmati berada di sana. Pertanyaan yang penting adalah apakah kita akan mulai dengan bahasa dulu baru sastra, lalu bagaimana tradisi lisan masuk di dalam hasilnya?

Pada penelitian kami jika kita hanya memulai dengan bahasa, baru kemudian sastranya termasuk, tradisi lisannya termasuk, tradisi lisan tidak akan berjaya. Akan tetapi, jika dibalik, tradisi lisan yang dijayakan dan dikelola dengan berbagai teori serta konsep, otomatis bahasanya akan terpelihara karena bahasa menyangkut dengan tradisi. Jika bahasanya saja yang dipelihara, tradisinya belum tentu terpelihara. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi dan rekonstruksi. Ini juga merupakan suatu konsep tersendiri. Revitalisasi dan pengelolaan dimulai dengan program dokumentasi. Dokumentasi adalah hal yang terpenting. ATL bekerja sama dengan Library of Kongres untuk digitalisasi data-data yang ada di ATL. Mungkin pada tahun 2019 data tersebut sudah dapat diakses. Library of Kongres yang pertama berpusat di Washington DC. Di Jakarta akan ada kantornya juga.

Program dokumentasi belum bisa dilaksanakan dengan baik jika terkendala dana. Kita perlu meniru yang dilakukan Spiconi Foundation (ATL pernah bekerja sama dengan Spiconi untuk beberapa tradisi) dalam melakukan pendokumentasian. Mereka melakukannya dengan peralatan yang baik dan pendekatan tertentu pada komunitas. Dokumentasi ini akan mendukung penguatan kembali keberadaan rumah, bukan dalam arti fisik, melainkan rumah dalam arti tanah kawasan yang sudah dimiliki saat ini dan melindungi masyarakat dari tekanan dari luar. Dasar filosofi ini yang saya tuliskan supaya bisa kita petik.





**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 4 Kelompok 5**

Pembicara : Pudentia M.P.S.S.

Judul Makalah: “Pengelolaan Bahasa dan Sastra Daerah”

Hari, Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2018

Pukul : 13.45—15.15

Moderator : Dr. Asrif, M.Hum

Pencatat : 1. Miranti Sudarmaji  
2. Mukhamdanah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Tradisi lisan dikelola sebagai warisan budaya. Fungsi tradisi lisan membangun karakter bangsa dan sumber pengetahuan menuju pengetahuan. Hilangnya penutur akan menghilangkan tradisi.
3. Kurangnya pengetahuan dari pemangku kebijakan juga akan menyebabkan terancamnya sebuah tradisi.
4. Alam lingkungan yang hilang juga akan menghilangkan sebuah tradisi.
5. Ketahanan budaya akan memberikan kontribusi pada peradaban dunia, termasuk bahasa dan sastra. Hilangnya suatu bahasa merupakan pemiskinan kebudayaan. Kebudayaan tanpa peningkatan kesejahteraan akan dilupakan.
6. Bahasa dan sastra daerah pengelolaannya mencakup empat hal, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
7. Tradisi lisan merupakan multidisiplin, ada kaitan dengan sejarah nasional dan sejarah lokal, jadi tidak hanya dengan sastra.
8. Jika suatu tradisi hilang, misalnya, tradisi pembuatan perahu pinisi, sejumlah kosakata pun hilang. Pengetahuan tentang itu juga hilang.
9. Dalam data jumlah bahasa daerah di UNESCO, Indonesia masuk di area Pasifik.
10. Pemetaan bahasa dalam arti dokumentasi belum ada.
11. Para penutur yang mulai berkurang belum tergantikan.
12. Belum dilakukan upaya atau pemikiran bahasa dan sastra daerah sebagai bahasa dan sastra daerah. Selama ini, bahasa dan sastra daerah hanya dianggap sebagai pemer kaya bahasa dan sastra Indonesia.
13. Apakah kita akan mulai bahasa dulu, baru kemudian sastra dan tradisi? Ini tidak akan berjaya. Namun, jika sastra dan tradisinya dulu, bahasanya akan ikut berjaya.
14. Dokumentasi tradisi lisan perlu dilakukan, tidak hanya dengan kamera atau perekam yang apa adanya, tetapi harus dengan perlengkapan yang bagus.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Fidi Daeri

Instansi: Penulis, penyair, kolumnis



**Pertanyaan:**

Apa yang dibicarakan saat ini sudah dibicarakan sekian tahun yang lalu; yang dikeluhkan hampir sama. Pemerintah serius atau tidak? Karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Dalam bidang sastra, beberapa tahun yang lalu, agak ramai ketika sejumlah sastrawan diberangkatkan ke Frankfurt Book Fair (FBF). Kebanyakan yang diutamakan adalah sastra modern, *postmo*, sedangkan yang tradisi, mengeluh, tidak ada. Apakah hanya cukup mengeluh? Minta keputusan yang jelas, apakah semua yang dibicarakan masuk ataukah akan *muter* lagi?

**Jawaban:**

Kekayaan dalam bahasa dan tradisi tidak hanya penerjemahan. Pada waktu itu kita hanya berpikir tentang tradisi yang akan habis. Revitalisasi, misalnya, harus didahului dengan penelitian. Namun, terdapat kendala. Misalnya, anggaran penelitian untuk sains dan teknologi lebih besar jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian budaya.



#### 4. Revitalisasi Semangat Bahari untuk Menyongsong Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Melalui Karya Sastra Melayu

### REVITALISASI SEMANGAT BAHARI UNTUK MENYONGSONG INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA MELALUI KARYA SASTRA MELAYU

**Agik Nur Efendi**

Universitas Negeri Malang  
agiknur94@gmail.com

#### Abstrak

Indonesia memiliki bekal untuk menjadi poros maritim dunia dari segi historis-kultural. Sejarah telah mencatat bahwa pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Indonesia mengalami masa kejayaan di sektor maritim. Namun, perlahan-lahan kejayaan itu pudar. Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia menjadi tanggung jawab semua kalangan, termasuk peserta didik. Rancangan dalam penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menumbuhkan kembali semangat bahari dan budaya luhur pada diri generasi penerus bangsa melalui *Hikayat Hang Tuah*. Selain itu, menghayati kisah Hang Tuah juga dapat mengantarkan siswa untuk lebih mengenal jati diri bangsa. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa selain tokoh Hang Tuah yang menjadi inspirasi, kemajuan sektor maritim juga tidak lepas dari peran ekonomi, sarana transportasi, keamanan, dan politik yang benar-benar diperhatikan.

**Kata-kata kunci:** Indonesia, Hang Tuah, maritim, dan imajinasi kolektif

#### PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di jalur strategis dunia. Indonesia berada di jalur perlintasan antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia di sebelah utara dan Australia di sebelah selatan, serta samudra Hindia dan samudra Pasifik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam bentang wilayah 6° LU sampai 11° LS dan 92° sampai 142° BT, terdiri atas lebih kurang 17.504 pulau besar dan kecil. Bahkan, tiga perempat wilayah Indonesia adalah laut dengan luas 5,9 juta km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai 95.161 km<sup>2</sup>. Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip negara kepulauan. Hal itu membuat perairan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan menjadi negara yang bebas pada Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda menjadi cikal bakal terbentuknya UU No.4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia. Pada konvensi hukum laut (UNCLOS) ke-3 yang diselenggarakan oleh dewan PBB tahun 1982 ditetapkan Deklarasi Djuanda dan ditegaskan kembali melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara maritim atau negara kepulauan (Ramdhan dan Arifin, 2013).

Sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah, baik kekayaan yang belum dieksplorasi maupun yang sudah dieksplorasi. Kekayaan bahari yang dimiliki sejatinya dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan sumbangsih perekonomian



kepada masyarakat dan negara. Di bidang bahari, terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan, yaitu 1) hasil perikanan, 2) industri bioteknologi, 3) industri pengolahan, 4) industri maritime, 5) energy, 6) transportasi laut, 7) perdagangan, 8) wisata bahari, 9) infrastruktur laut, 10) energy, dan 11) jasa lingkungan. Modal potensi maritim tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tumpuan pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia.

Visi kemaritiman dalam mengelola negara sebenarnya sudah digagas sejak Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, kemudian dilanjutkan oleh penerusnya. Hal itu mengingat bahwa Indonesia berada dalam kawasan strategis di antara persimpangan jalur maritim dan pertemuan berbagai jalur pelayaran internasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki empat jalur lalu lintas pelayaran dunia dari tujuh jalur yang cukup ramai. Keempat jalur tersebut adalah Selat Malaka, Selat Makassar-Lombok, Selat Ombai-Wetar, dan Selat Sunda. Selain itu, terdapat juga tiga jalur lalu lintas perairan yang cukup ramai, yaitu Selat Gibraltar di antara Maroko dan Spanyol, Terusan Suez di Mesir, dan Terusan Panama di negara Panama (Sitohang, 2008, hlm. 30).

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, konsep Indonesia sebagai poros maritim kembali digalakkan. Hal itu sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong”. Pandangan tersebut kembali memunculkan semangat kemaritiman dengan memanfaatkan potensi kelautan Indonesia. Visi tersebut dirumuskan menjadi tujuh misi, yaitu 1) mewujudkan masyarakat yang maju dan demokratis berlandaskan hukum; 2) mewujudkan kualitas bangsa yang maju, tinggi, dan sejahtera; 3) mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing; 4) mewujudkan warga masyarakat yang memiliki rasa kepribadian tinggi dalam berkebudayaan; 5) mewujudkan keamanan nasional yang dapat menjaga kedaulatan, kemandirian ekonomi dengan sumber daya maritim, serta merepresentasikan sebagai negara maritim; 6) mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim; dan 7) mewujudkan negara maritim yang maju, kuat, mandiri, dan berbasis kepentingan negara. Berdasarkan tujuh misi tersebut, pemerintahan sekarang ini, Presiden Joko Widodo, menggarisbawahi tiga misi pada baris terakhir yang berhubungan dengan kemaritiman dan posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim.

Menurut Sukma (2014), gagasan poros maritim dapat diserap dalam tiga makna penting. Pertama, gagasan poros maritim yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dapat dimaknai sebagai cita-cita untuk membangun kembali identitas bangsa sebagai negara maritim. Pandangan ini mencerminkan kekuatan maritim Indonesia yang sejahtera, berwibawa, dan bersatu. Hal itu dapat diwujudkan dengan potensi laut dan sumber daya manusia. Kedua, poros maritim yang dicanangkan juga dapat menjadi sebuah pandangan/doktrin/cita-cita bersama. Pemerintah membangkitkan kembali semangat bangsa dan rakyat Indonesia untuk menggelorakan negara Indonesia sebagai poros negara maritim dunia. Ketiga, Presiden Joko Widodo mempunyai keinginan untuk melaksanakan gagasan poros maritim dengan membuat agenda konkret dalam masa bakti pemerintahannya. Agenda yang telah disusun dengan memperhatikan misi sebagai negara maritim memberikan capaian dalam kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.



Pemerintah mengambil peran dalam setiap momen internasional guna mewujudkan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada tahun 2009 Indonesia menjadi tuan rumah World Ocean Conference (WOC) di Manado. Selain itu, Indonesia juga menjadi penyelenggara dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PBB, UNEP, serta berbagai lembaga internasional seperti WWF (Setneg, 2009). Acara-acara tersebut merupakan kegiatan yang memberikan perhatian khusus terhadap sumber daya laut. Dalam agenda tersebut, Indonesia mengambil momen sehingga mampu menjalin kerja sama internasional. Dengan cara seperti itu, sumber daya laut Indonesia dapat ditingkatkan, dikembangkan, dan dilestarikan. Selain itu, tanggal 19 April 2016, pada sidang International Maritime Organization (IMO) di London, Inggris, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa Indonesia akan terus bersungguh-sungguh dan berkomitmen sebagai poros maritim dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan duta besar dan pejabat tinggi perwakilan dari 171 negara (Setkab, 2016).

Hal yang berkaitan dengan laut dan lautan tidak dipandang dari aspek duniawi saja, tetapi juga tercantum dalam agama. Sebagai contoh, dalam kitab suci agama Islam (Alquran) terdapat 13 ayat yang menyampaikan tentang daratan dan 32 ayat menyebutkan tentang laut. Ayat tersebut memiliki kesamaan dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli sains, yakni sekitar 71% wilayah bumi adalah air (samudra, laut, sungai, danau, dan sebagainya), sedangkan 29% adalah tanah (Djamil, 2004). Berdasarkan hal itu telah terpaparkan bahwa lautan lebih unggul daripada daratan.

Sejarah nusantara menunjukkan bahwa pelaut Indonesia selalu berjaya. Hal itu dapat ditelusuri dalam kisah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit yang mampu memiliki kekuatan maritim untuk menguasai perdagangan di nusantara hingga mancanegara. Selain itu, kekuatan kedua kerajaan tersebut mampu melegitimasi kekuasaan yang disegani oleh kerajaan lain (Prasetyono, 2008, hlm. 350). Kerajaan Sriwijaya mampu menguasai perdagangan, pelayaran, dan kekuasaan maritim tidak hanya di nusantara, tetapi sampai ke mancanegara. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya dalam menguasai kawasan maritim perlahan-lahan menyusut sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah berakhirnya kejayaan Kerajaan Sriwijaya, pada abad ke-14 muncul Kerajaan Majapahit. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada saat dipimpin Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Pada masa kepemimpinan tersebut, Majapahit memiliki armada laut yang sangat kuat dan ditakuti. Kerajaan Majapahit menguasai perdagangan dan mempersatukan nusantara.

Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit, muncul Kerajaan Malaka pada pertengahan abad ke-15 yang kemudian dikenal sebagai kota perdagangan dan kerajaan maritim yang termasyhur di Semenanjung Melayu. Kerajaan Malaka memiliki letak yang strategis sehingga menjadi tempat berkumpulnya para pedagang dari penjuru nusantara hingga mancanegara (Cina, Eropa, dan Asia Timur). Setelah jatuhnya Kerajaan Malaka, muncul kembali beberapa kerajaan maritim di nusantara, yaitu Demak, Banten, Jepara, Palembang, Jambi, Ternate, dan Tidore. Kisah sejarah kerajaan di nusantara menunjukkan semangat dan kegigihan masyarakat Indonesia sebagai negara maritim. Bahkan, menurut Robert Dick-Read (2008), kegigihan dan semangat pelaut Indonesia dalam mengarungi lautan Hindia dalam melancarkan perdagangan hingga ke Afrika dan Madagaskar.



Tradisi dan keberanian leluhur bangsa Indonesia yang menjelajah laut hingga ke mancanegara tidak berlanjut ke anak-cucunya karena orientasi mereka beralih ke daratan. Fenomena tersebut tidak lepas dari campur tangan bangsa Belanda ketika mendarat di nusantara. Belanda telah menyadari kemampuan mengelola maritim yang dimiliki masyarakat Indonesia. Hal itu mendorong Belanda membuat doktrin untuk menjauhkan masyarakat dari laut menuju daratan, bahkan hingga ke pegunungan. Pada saat itulah sektor pertanian dan daratan menjadi berkembang. Hal itu membuat Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Oleh karena itu, pentingnya memandang laut sebagai aset strategis dan sumber kehidupan harus tetap dijaga dan digalakkan. Hamengkubuwono X (2014) menyampaikan bahwa keperkasaan, kegigihan, keberanian, dan kejayaan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai pelaut dapat menjadi pelecut semangat bagi generasi berikutnya. Bentuk implementasinya tidak hanya berlayar, tetapi bagaimana bangsa Indonesia dapat memanfaatkannya demi kesejahteraan pembangunan bangsa.

Gagasan menjadi poros maritim merupakan wujud aktualisasi wawasan dan kearifan nusantara untuk menumbuhkan sikap, pola pikir, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia, dibutuhkan waktu dan proses yang cukup lama serta kerja sama seluruh *stake holder* terkait. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan bahari dalam menumbuhkan cita-cita sebagai poros maritim dunia. Dalam hal ini, *Hikayat Hang Tuah* dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran di sekolah, terutama untuk menumbuhkan kembali semangat bahari pada peserta didik. Hal itu selaras dengan pandangan Pratiwi (2016) bahwa sekolah merupakan tempat belajar atau laboratorium budaya yang memfasilitasi siswa untuk belajar dan melakukan berbagai adaptasi sosial dan hubungan multibudaya yang selaras dan produktif.

*Hikayat Hang Tuah* menceritakan perjuangan dan kegigihan tokoh bernama Hang Tuah atau Tun Tuah. Hang Tuah lahir di daerah Pulau Lingga, Kepulauan Riau. Hang Tuah memiliki semangat pantang menyerah, setia, dan dikenal sebagai pelaut yang hebat. Kemahirannya membuat kapal dan memimpin armada di laut sudah tidak diragukan lagi sehingga ditakuti musuh-musuhnya. Cerita Hang Tuah pada mulanya berupa manuskrip dan terdapat pada kesusastraan Melayu, kemudian ditransformasikan ke dalam berbagai karya dengan bahasa yang berbeda. Muhammad Haji Salleh berhasil menulis *Hikayat Hang Tuah* dalam bahasa Melayu Modern. *Hikayat Hang Tuah* mengandung nilai-nilai klasik yang dapat menjadi pedoman hidup umat manusia, terutama dalam bidang kemaritiman.

Kajian ini diharapkan dapat menumbuhkan kembali semangat bahari dan budaya luhur generasi muda. Selain itu, melalui *Hikayat Hang Tuah*, generasi muda (siswa) mengenal jati diri bangsa. Dengan demikian, *Hikayat Hang Tuah* dapat dijadikan bahan pembelajaran dan meningkatkan semangat bahari guna merealisasikan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan nilai-nilai kemaritiman yang terdapat dalam *Hikayat Hang Tuah*. Sumber data dalam kajian ini adalah *Hikayat Hang Tuah* karya Muhammad Haji Salleh, yang diterbitkan oleh PT Ufuk Publishing House pada tahun 2013.



Kalimat dan paragraf yang berkaitan dengan nilai-nilai poros karakter maritim menjadi data dalam penelitian ini. Ada dua cara dalam melakukan pengolahan data, yaitu pembacaan intensif teks dan pencatatan. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik deskriptif-analisis. Menurut Ratna (2010, hlm. 53), metode deskriptif analisis dapat dilakukan dengan mendeskripsikan fakta, lalu disesuaikan dengan analisis. Tahapan yang dilakukan adalah menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam *Hikayat Hang Tuah*, kemudian menghubungkannya dengan tujuan penelitian. Kesahihan dalam penelitian ini menggunakan kesahihan semantik untuk mengukur makna sesuai dengan konteks. Kesahihan tersebut dapat dicapai dengan pembacaan berulang-ulang. Hal itu akan membentuk konsistensi data. Berdasarkan kategorinya, peneliti melakukan analisis data secara induktif.

## PEMBAHASAN

*Hikayat Hang Tuah* merupakan epos terbesar dan teragung dari kesusastraan Melayu. Kebesaran dan keagungan *Hikayat Hang Tuah* telah mampu menarik para sarjana dari berbagai penjuru dunia untuk meneliti, mengkaji, dan mengambil sari kehidupan dari hikayat tersebut. Tahun 1964, 1966, dan 1997, Kassim Ahmad telah mengkaji watak dan perwatakan *Hikayat Hang Tuah*. Tahun 1990, Braginsky membahas makna dan struktur yang terkandung dalam *Hikayat Hang Tuah*. Hal itu diikuti juga oleh Errington pada 1982. Selain itu, terdapat nama lain seperti Kratz (1993), Abu Hassan Sham (1993), Lokman Abdul Samad (2001), Muhammad Haji Saleh (2006), serta Nor Hashimah dan Ruzaiman (2008) yang juga mengkaji berbagai aspek yang terdapat dalam *Hikayat Hang Tuah*. Kebesaran dan keagungan *Hikayat Hang Tuah* sebagai karya sastra Melayu telah berhasil membuat para peneliti dari berbagai penjuru untuk mengkaji hikayat tersebut (Ali, 2013, hlm. 10).

*Hikayat Hang Tuah* muncul dari imajinasi Melayu di nusantara pada masa lampau dan dewasa ini dianggap sebagai karya sastra agung di berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, dan Brunei. Kesusastraan Melayu klasik merupakan bukti konkret kebudayaan hasil pemikiran orang-orang terdahulu yang dituangkan ke dalam bahasa dan sastra (Murniati, 2017, hlm. 15). Secara umum, cerita hikayat menyajikan kisah heroik, seperti kisah Hang Tuah sebagai tokoh laksamana hebat di lautan. Lautan yang menjadi latar tempat penceritaan mengungkapkan keberanian di bidang maritim sehingga dikenal sebagai pahlawan antarpulau. Aksi kepahlawanannya yang melegenda tidak hanya di tanah nusantara, tetapi menyebar di wilayah Asia Tenggara.

Aspek kemaritiman Indonesia telah mengalami degradasi yang cukup substansial. Bercermin pada masa lalu, jati diri Indonesia dikenal sebagai bangsa penghuni Negara Maritim. Paradigma maritim telah melekat pada bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia telah lama memiliki pranata dalam berdagang, khususnya perdagangan antarpulau, menciptakan kapal yang hebat, memiliki armada laut yang disegani, dan berbagai aktivitas maritim lainnya. Hal tersebut dapat dikatakan ironi karena Indonesia memiliki sumber daya dan potensi kelautan terbesar di dunia, tetapi sekarang berada pada kondisi yang memprihatinkan.



## 1. Bekal Tokoh Inspiratif “Laksamana Hang Tuah”

Sebagai upaya mengembalikan kejayaan di laut, Indonesia mempunyai potensi historis-kultural. Historis-kultural akan mampu menumbuhkan hasrat kebersamaan yang tertanam dalam kehidupan masyarakat. Namun, imaji sosial tidak otomatis dapat mewujudkan kesejahteraan secara konkret. Faruk (2018) mengatakan bahwa imajinasi mengenai kebangsaan dan negara bangsa di Indonesia selama ini dibangun dari percampuran antara citra-citra primordialisme di satu pihak dan teknologi serta pengetahuan modern di lain pihak. Bayang-bayang tradisionalisme inilah yang membuat kebangsaan dan negara bangsa di Indonesia cenderung dibangun di atas dasar produksi dan reproduksi gagasan mengenai musuh bersama, pikiran-pikiran, dan citra kehidupan yang antagonistik (hlm. 37).

Imajinasi mengaitkan penggabungan aspek ingatan, pengalaman, dan kenangan dari berbagai aspek menjadi suatu bangunan kekuatan atau mental yang konstruktif. Konstruksi imajinasi masa lalu nantinya menjadi realitas yang digunakan pada masa kini. Sari-sari imajinasi dan kenangan kebersamaan yang berupa kebaikan dapat digunakan dalam membangun citra masa kini. Pengalaman tersebut memberi antisipasi realita pada generasi yang ada pada masa mendatang. Imajinasi sering diasosiasikan sebagai fungsi mental dan unsur fantasi, angan-angan, atau berbagai bentuk untuk memecahkan masalah secara nyata.

Konsep imajinasi memegang peran penting dalam kehidupan. Imajinasi mampu memberi unsur semangat bagi individu, masyarakat, bangsa, bahkan negara. Konsep bangsa dalam pandangan Anderson (2002, hlm. 8) merupakan sesuatu yang dibayangkan karena tiap anggotanya yang paling kecil tak akan pernah saling mengenal atau bertatap muka sekali pun dengan sebagian besar anggotanya yang lain. Dalam benak tiap-tiap individu tersebut terdapat sebuah bayangan akan kebersamaan mereka sehingga representasi imajinasi kolektif dipandang membentuk perspektif kemajemukan dan kemajuan budaya serta peradaban suatu bangsa.

Anderson meyakini bahwa di antara sesama warga negara-bangsa terdapat imajinasi kolektif yang menyatukan mereka sehingga dapat membangkitkan ikatan solidaritas dan ikatan kesetiaan terhadap negara-bangsanya. Dalam konteks ini, pendiri bangsa mampu memberikan representatif yang nyata dari imajinasi kolektif berupa semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Hal itu mengikat kemajemukan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan kultur, etnis, budaya, dan bahasa yang beragam. Adanya konteks imajinasi kolektif mampu mengkonstruksi karakteristik dan pemikiran manusia dalam bentuk citra mental.

Hanif (2007) mengatakan bahwa imajinasi kolektif atau rasa kebersamaan berkaitan dengan kesejahteraan merupakan pandangan purba atau hasrat masa lalu yang terdapat dalam pemikiran manusia masa kini. Pandangan bersama untuk menjadikan pengalaman bersama sebagai identitas telah ada sejak lama dalam diri manusia. Sebagai bentuk imaji bersama, karya *Hikayat Hang Tuah* mampu merevitalisasi kembali semangat yang melekat dalam diri masyarakat. Kisah seorang tokoh tersebut dimulai dari tanah Riau yang ingin mencari kehidupan baru, terutama dari sektor maritim. Kemahiran Hang Tuah dalam hal maritim tidak diragukan lagi. Bakat Hang Tuah yang akan menjadi pemimpin di lautan telah tampak ketika dirinya memutuskan untuk mencari sesuatu yang berguna dengan cara berlayar di lautan.





Pada suatu hari Hang Tuah menyarankan kepada mereka, “Teman-temanku sayang, kurasa kita berlima bisa mendayung perahu ke suatu tempat di mana kita bisa mendapatkan uang.”

Hang Jebat dan Hang Kasturi menjawab, “Betul juga, mengapa kita berlima tidak berlayar saja?”

Kemudian Hang Tuah berkata, “Baiklah kalau begitu. Ayahku memiliki sebuah perahu, lengkap dengan layarnya.” (Sallah, 2013, hlm. 84).

Pada diri manusia imajinasi memegang peran penting dalam menjalankan sendi-sendi kehidupan. Selain pengetahuan, imajinasi mampu memberikan bentuk pemikiran dan tindakan yang mampu mengubah suatu hal. Dalam hal ini, Hang Tuah menjadi pelopor atau inisiator untuk menyongsong perubahan dalam hidup. Tidak ada yang mengetahui setiap kejadian dalam hidup. Seseorang hanya menjalankan hasrat yang telah ada dengan segala akibat yang akan datang. Ketika memelopori terjun menjadi pelaut, Hang Tuah saat itu masih sangat muda dan tergolong masih anak-anak. Namun, pemikirannya untuk mencari sesuatu yang baru merupakan bakat yang nyata. Hang Tuah bersama teman-temannya, yaitu Hang Lekir, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Kasturi, dan Hang Lekiu mencoba berspekulasi untuk mendapatkan uang dengan berlayar ke suatu tempat. Hang Tuah menjadi pemimpin kelompok untuk menjalankan misi mendapatkan uang. Pemilihan Hang Tuah untuk menjadi pemimpin merupakan proses alamiah dalam kelompok tersebut karena Hang Tuah memiliki bekal dari gagasan-gagasan untuk melakukan sesuatu.

Hang Tuah mendapat ujian pertama dalam mengarungi lautan dari para bajak laut. Hang Tuah telah menyadari bahwa kapal yang ditumpangi bersama teman-temannya telah diintai oleh segerombolan bajak laut. Fenomena tersebut telah menjadi bagian dari suatu pelayaran sehingga ketika ada bajak laut, Hang Tuah tetap dapat melewatinya dengan baik. Hang Tuah sebagai pemimpin kelompok telah memiliki syarat sebagai calon pemimpin yang hebat. Hang Tuah mempunyai pemikiran bahwa untuk menghadapi bajak laut akan sulit dilakukan di laut, apalagi kapalnya lebih kecil daripada kapal bajak laut. Hang Tuah berinisiatif untuk menggiring bajak laut ke sebuah pulau dan bertarung di tempat tersebut.

Hang Tuah tersenyum, lalu berkata, ‘Para Sahabatku, kurasa kita harus bertarung di darat sebab perahu kita sangat kecil dan kita semua pasti akan dikalahkan oleh tiga kapal itu karena semuanya besar dan bersenjata lengkap, serta diawaki oleh banyak orang. Tidak akan mudah bagi kita untuk mengalahkan mereka.’ (Salleh, 2013, hlm. 85)

Hang Tuah mendapatkan masalah pertama. Kecerdasan Hang Tuah dalam menghadapi musuh adalah mengidentifikasi masalah dan pemecahan masalah. Melalui berbagai pertimbangan, Hang Tuah mampu mengidentifikasi bahwa dengan cara melawan musuh di laut akan tidak seimbang. Karena itu, ia melakukannya di daratan. Di daratan keleluasaan untuk menaklukkan bajak laut akan lebih mudah. Sosok Hang Tuah yang patut diketahui dan dicontoh adalah kemampuan memandang masalah yang tidak dilihat oleh orang lain. Dalam situasi sulit Hang Tuah mampu menentukan suatu kebaruan dengan melakukan



terobosan-terobosan yang tidak terduga. Akibatnya, secara tidak langsung ia dapat mengubah, bahkan menggeser pola pikir yang sudah mapan.

Perampokan bajak laut dilakukan dengan kekerasan dan perampasan muatan kapal, bahkan disertai pembunuhan. Para bajak laut tidak segan untuk menjarah dan melawan siapa saja yang menentang kehendak mereka, baik orang tua maupun anak kecil. Membawa mereka ke darat merupakan tindakan yang tepat. Ketika berada di daratan, pertarungan antara kelompok Hang Tuah dan para bajak laut benar-benar terjadi. Meskipun masih anak-anak, Hang Tuah beserta teman-temannya mampu menyulitkan langkah para bajak laut, bahkan mereka mampu membunuh beberapa bajak laut.

Kecerdikan Hang Tuah selanjutnya tampak ketika ia mengambil keputusan untuk mendekati kapal yang sedang berlayar. Setelah bertarung dan membunuh beberapa bajak laut di daratan, ternyata perlawanan lebih besar ditunjukkan kembali oleh para bajak laut. Kapal besar dan armada yang lebih banyak mencoba mengejar kapal kecil yang hanya ditumpangi oleh lima anak kecil. Hang Tuah menyadari bahwa melakukan perlawanan melawan mereka dengan jumlah dan senjata yang tidak sebanding tentu akan sia-sia. Namun, Hang Tuah mencoba mengarahkan kapal yang ditumpangi untuk mencoba mendekati kapal besar yang melintas.

Hang Tuah melihat mereka meninggalkan Selat Singapura dan dia segera membelokkan perahunya ke arah mereka. Pemimpin awak kapal di semua perahu tersebut dapat melihat sebuah perahu sempit berisi lima orang sedang dikejar oleh enam kapal perahu musuh yang mendekati mereka (Salleh, 2013, hlm. 86).

Setelah menghadapi ujian pertama bertarung dengan bajak laut dan berhasil mengalahkan mereka, Hang Tuah kembali mendapatkan ujian. Merasa dikalahkan oleh gerombolan anak kecil, para bajak laut tidak terima dan melaporkan kepada rekan-rekannya yang berada di kapal besar. Mendengar kabar tersebut, mereka mengejar kapal yang ditumpangi Hang Tuah. Kecerdikan mengatur strategi tampak pada diri Hang Tuah. Jumlah yang tidak sebanding membuatnya mengarahkan pemikiran untuk mendekati kapal yang sedang berlayar di Selat Singapura. Hang Tuah mendekati kapal tersebut meminta bantuan melawan para bajak laut. Meskipun tanpa ucapan verbal, hanya menggunakan tanda dengan mendekati kapal, para awak kapal tersebut menyadari bahwa perahu kecil Hang Tuah sedang diserang musuh. Pemikiran Hang Tuah tersebut berdampak pada tindakan yang diambil oleh para bajak laut. Mereka memutuskan untuk mundur dan tidak menyerang perahu Hang Tuah.

Perspektif tentang pelaut menjadi endapan yang telah ada pada diri bangsa Indonesia. Sosok Hang Tuah telah mengilhami bangsa Indonesia sebagai tokoh yang gigih di lautan. Bakat Hang Tuah sejak kecil sebagai pelaut telah tumbuh dan menjadi identitas dalam dirinya. Sebagai tokoh maritim dan pelaut hebat, sosok Hang Tuah mampu menjadi representasi. Indonesia memiliki sumber daya manusia di bidang maritim dalam diri Hang Tuah. Memiliki kebanggaan terhadap tokoh akan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Hal tersebut seperti yang disampaikan Silalahi (2005) bahwa peringkat rasa kebangsaan atau nasionalisme suatu bangsa yang hadir dalam sikap cinta tanah air dan patriotisme adalah



pendukung utama suatu strategi keamanan nasional. Makin tingginya rasa kebangsaan dan cinta tanah air akan memberikan sumbangan yang positif terhadap strategi keamanan nasional.

## 2. Pranata Hubungan Perdagangan

Selain tokoh pelaut yang hebat, masyarakat Indonesia telah memiliki pranata hubungan perdagangan. Budaya kemaritiman bangsa Indonesia bukan fenomena yang baru. Sejarah menunjukkan bahwa kehidupan kemaritiman, pelayaran, dan perikanan merupakan suatu kelangsungan proses perkembangan bangsa Indonesia yang ada pada masa lalu. Terlaksananya hubungan dagang yang baik tidak lepas dari lokasi yang strategis. Selain itu, pemerintahan yang memimpin suatu wilayah juga memengaruhi kedatangan para pedagang. Adanya pemimpin wilayah maritim yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik, termasuk permukiman yang juga menjadi tempat penting bagi pertumbuhan perdagangan. Pemusatan antara pelabuhan dan pemerintah kerajaan menjadi faktor umum dalam dunia maritim sehingga membuat permukiman menjadi ramai. Hubungan antara pelabuhan dan pemerintahan yang strategis menjadi pintu gerbang utama suatu perekonomian.

Hang Mahmud memasukkan harta benda keluarganya ke sebuah perahu panjang sempit dan mereka mendayungnya ke Bintan. Di sana mereka membangun sebuah rumah di dekat desa Bendahara, dan Hang Mahmud pergi untuk berdagang dengan membuka sebuah toko yang menjual kue dan makanan. (Salleh, 2013, hlm. 82)

Pelayaran dan perdagangan laut menjadi keunikan masyarakat nusantara pada zaman dulu. Masyarakat yang hidup di pesisir lautan memiliki tradisi perdagangan dan pelayaran yang kuat. Kawasan pantai strategis diiringi dengan pemimpin kerajaan yang bijaksana makin menambah jaminan kesejahteraan. Pemimpin yang bijaksana membuat masyarakat tenang dalam bekerja dan kesejahteraan akan terjamin. Hal tersebut mendorong masyarakat lain untuk datang mengadu nasib. Konsep mendekati wilayah yang strategis di bawah kepemimpinan raja yang bijaksana telah disadari oleh orang tua Hang Tuah. Pada saat itu Hang Mahmud beserta keluarganya melakukan migrasi ke Bintan. Berpindah tempat menuju perputaran ekonomi telah menjadi fenomena yang wajar. Mendekati kawasan dagang yang strategis guna mendirikan tempat tinggal menjadi faktor perputaran ekonomi. Perdagangan dan pelayaran menjadi ujung tombak dalam budaya maritim.

Tanpa membuang waktu, dia memanggil semua kapten kapalnya dan memerintahkan mereka, “Kapten, aku ingin berlayar ke Tanah Melayu, sekarang kalian harus memuat barang dagangan yang cocok untuk dibawa ke sana.”

Ketujuh kapten tersebut mulai mengisi kapal dengan barang dagangan dan dalam tujuh hari mereka telah siap. Tak lama kemudian, mereka berlayar menuju Tanah Melayu. (Salleh, 2013, hlm. 180)



Kawasan yang baik mengundang kalangan dari berbagai suku bangsa untuk datang memasarkan komoditas mereka. Wilayah Melayu termasuk ke dalam kawasan jalur perdagangan dunia yang paling ramai sehingga tidak mengherankan jika banyak masyarakat yang ingin berdagang di kawasan Melayu.

### **3. Konsep Penarikan Pajak dari Sektor Kelautan**

Banyaknya pedagang di kawasan Melayu membuat raja berinisiatif untuk melakukan penarikan pajak. Penarikan pajak merupakan hal yang sah dan menjadi salah satu faktor pendapatan daerah. Pajak dilakukan sebagai timbal balik antara pemberi pajak dan penerima pajak. Pajak tersebut nantinya akan dikembalikan lagi untuk membiayai dan mengembangkan wilayah.

Yang Mulia berkata, “Bendahara Terhormat, aku ingin menunjuk para kapten galiung itu sebagai kepala muara sungai. Mereka akan memungut pajak dari siapa pun yang datang untuk berdagang, yang saat ini semuanya ada sebelas sungai. Seandainya musuh menyerbu atau menyerang penduduk negeri ini, maka mereka akan melakukan patrol di laut dan bertindak sebagai penjaga pantai.” (Salleh, 2013, hlm. 214)

Wilayah perdagangan yang strategis membuat iklim perekonomian tumbuh dengan pesat, apalagi pada masa kejayaan Melayu pajak merupakan pemasukan devisa. Penerapan pajak dilakukan pada setiap orang yang berdagang di muara sungai. Pegawai pajak diatur dan terstruktur. Raja telah mencetuskan konsep tersebut dan disampaikan kepada bendahara. Arahan diturunkan kepada kepala sungai untuk menjalankan instruksi tersebut. Semua bentuk pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai keamanan wilayah perdagangan sehingga pajak yang diterapkan secara adil akan menghasilkan hubungan timbal balik yang menguntungkan.

### **4. Sarana dan Transportasi Laut**

Kemajuan sektor perdagangan di laut, pesisir, dan sungai merupakan faktor utama sumber kekuatan suatu bangsa. Untuk mengembangkan perekonomian tersebut, diperlukan tempat berdagang yang baik. Meskipun kawasan tersebut strategis, jika pelabuhan yang dimiliki tidak sesuai, hal itu akan berdampak pada sisi ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada fasilitas, termasuk fasilitas yang mampu menarik minat pedagang untuk datang. Untuk itu, pelabuhan-pelabuhan dibangun sehingga berbagai kegiatan dagang dari wilayah nusantara dan berbagai penjuru dunia akan ramai.

Tak lama kemudian, para nelayan menemuinya untuk menyerahkan hadiah berupa daun sirih dan buah pinang, serta berbagai macam buah-buahan. Dengan bantuan mereka, dia mengemudikan kapalnya memasuki pelabuhan. (Salleh, 2013, hlm. 183)

Setelah singgah beberapa hari di Palembang, Paduka Raja berpamitan dan berlayar menuju Malaka. Ketika mereka memasuki pelabuhan, alat musik ditabuh dan dipetik dengan irama yang sangat keras. Sebagai balasan, Laksamana menembakkan tujuh meriam. (Salleh, 2013, hlm. 359)



Kota yang berbasis perdagangan akan memperhatikan kondisi pelabuhan yang ada. Pelabuhan yang menjadi tempat singgah kapal-kapal merupakan penggerak perekonomian. Kota Palembang merupakan basis perlintasan kapal-kapal dunia dengan pelabuhan yang memadai. Selain untuk berlabuhnya kapal dan berdagang, pelabuhan digunakan sebagai sarana berkumpul masyarakat ketika mengantar atau menyambut para kerabat. Masyarakat setempat menjadikan pelabuhan untuk menyambut raja yang telah selesai dari pelayarannya. Rasa kebanggaan bersama mengasumsikan bahwa kebanggaan yang melekat pada diri mereka menjadikan penguat dalam berkehidupan. Pandangan konstruktif ini berlandaskan rasa nasionalisme untuk menghasilkan imajinasi bersama dalam mengkonstruksi perbedaan mereka. Batas tersebut dibangun berdasarkan budaya dan kesamaan. Rasa kebanggaan dan saling memiliki yang melekat pada masyarakat membangun sebuah paradigma tentang rasa nasionalisme bangsa.

Letak strategis Indonesia menjadi sasaran masalah keamanan bidang kemaritiman. Oleh karena itu, dibutuhkan kekuatan armada laut yang kuat guna mengamankan situasi perairan Indonesia.

Kapal mendekati galiung tersebut dalam posisi siap perang. Kapal besar tersebut ternyata dilengkapi dengan senjata perang kerajaan dan tiga perahu didayung di kanan dan kiri kapal. Namun, kapal kerajaan tersebut diperkuat dengan kulit sehingga saat ditembak, kulit tersebut akan meredam kekuatan meriam sehingga menyebabkan kapal tersebut bergoyang, tetapi tidak dapat ditembus. (Salleh, 2013, hlm. 209)

Sebagai transportasi laut yang memadai, kapal memegang peranan yang sangat vital. Kapal menjadi tunggangan dalam menjalankan segala aktivitas di lautan. Untuk menuju poros maritim dunia, dibutuhkan kapal yang berkualitas, baik kapal untuk berdagang, berlayar, maupun berperang. Sejatinya, Indonesia telah memiliki kearifan lokal dalam membuat kapal. Masyarakat timur Indonesia memiliki kapal yang termasyhur, yaitu kapal pinisi. Nenek moyang Indonesia dikenal dalam membuat kapal dan mendesain kapal. Dalam *Hikayat Hang Tuah* diungkapkan bahwa masyarakat nusantara dulu merupakan masyarakat yang mahir dalam membuat kapal.

Bendahara dan Tumenggung memerintahkan para pekerja untuk pergi ke hutan guna memilih pepohonan untuk dijadikan papan. Dalam waktu lima hari, lunas dan papannya telah siap. Semuanya dibawa menuju tempat pembuatan kapal. Suasannya menggembirakan ketika Raja hadir saat peletakan lunas dan lambang kapal.

Paduka Raja berkata, “Bendahara Terhormat, apa desain terbaik untuk kapal ini?”

Bendahara menjawab, “Maharaja, hamba ingin membuat kapal ini dengan desain seekor kumbang nuri.” (Salleh, 2013, hlm. 264)

Mewujudkan cita-cita sebagai negara maritim harus dilengkapi dengan sarana transportasi yang memadai. Kapal menjadi penggerak transportasi laut untuk mengunjungi pulau. Kearifan lokal dalam membuat kapal di nusantara tampak pada penggalan kutipan tersebut. Dalam membuat kapal harus ditentukan bentuk



dan desain. Masyarakat pada zaman dahulu memanfaatkan binatang sebagai inspirasi dari pembuatan kapal. Selain itu, bahan pembuatan kapal juga menjadi faktor penting. Pemilihan kayu yang akan digunakan benar-benar diperhitungkan, terutama dalam memilih bahan kayu yang baik dan berkualitas. Dalam membuat kapal atau barang-barang lainnya, masyarakat nusantara selalu menggunakan prinsip gotong royong. Dengan gotong royong, pekerjaan membuat kapal yang akan ditumpangi Maharaja menuju Majapahit menjadi cepat selesai.

Kerja sama antarsesama masyarakat mampu menjalin rasa saling memiliki. Hadirnya seorang raja makin meningkatkan jiwa yang setia. Smith (1991) berpendapat bahwa elemen kesetiaan atau kepemilikan terhadap negara-bangsa (nasionalisme) tersebut ditumbuhkan melalui memori kolektif dan sejarah masa lalu yang terus menerus dikembangkan dan diwariskan oleh pemerintah entitas negara-bangsa. Elemen nasionalisme itulah yang menjadi landasan ikatan solidaritas yang menyatukan sesama warga negara di dalam entitas negara-bangsa.

## **5. Kedaulatan dan Politik**

Selain permasalahan yang terkait dengan aspek ekonomi, sektor maritim juga memiliki permasalahan dalam bidang keamanan dan politik. Usaha untuk menjaga kedaulatan wilayah harus mempersiapkan pertahanan diri. Perebutan wilayah dan kekuasaan dapat terjadi suatu waktu. Dengan kata lain, selain memperkuat pasukan, pembangunan benteng pertahanan juga perlu dilakukan. Benteng pertahanan akan membantu jika terjadi peperangan. Sebagai wilayah maritim yang memiliki banyak pulau, pembangunan benteng di pulau yang terdepan atau pulau yang strategis dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan. Kesadaran tersebut telah disadari pada masa Kerajaan Melayu.

Pada hari baik, Bendahara dan Tumenggung serta semua pembesar, baik muda maupun tua, bekerja membersihkan pulau tersebut. Mereka tinggal di sana, sibuk menyelesaikan tugas mereka. Sementara itu, Raja dan Ratu Melayu berlayar menuju Bintan.

Dalam beberapa hari, pulau tersebut telah bersih dari pepohonan dan semak belukar. Bendahara membangun sebuah benteng yang mengelilingi seluruh pulau. (Salleh, 2013, hlm. 151)

Pembangunan benteng pertahanan menjadi agenda yang harus diselesaikan oleh kalangan penduduk Kerajaan Melayu. Mengingat perang bisa dapat meletus kapan saja, pembangunan benteng pertahanan sangat diperlukan. Faktor lingkungan dalam membangun benteng termasuk aspek yang harus diperhatikan. Konsep pembangunan benteng dilaksanakan dengan bergotong royong mulai dari bendahara hingga rakyat biasa. Hal tersebut senada dengan pendapat Smith bahwa sentimen kepemilikan (ikatan solidaritas) sesama warga negara-bangsa dipengaruhi dengan semangat persaudaraan. Pendirian benteng di suatu pulau tidak terlepas dari syarat pentingnya nilai pulau tersebut. Letak pulau yang strategis dalam menghadapi musuh, sumber daya bahari, dan aspek menjaga kedaulatan wilayah menjadi landasan didirikannya benteng pertahanan.

Sebagai negara yang berada di perlintasan dua benua dan dua samudra, Indonesia termasuk negara yang memiliki sisi kerawanan dari sektor laut. Ancaman tersebut berupa keamanan laut yang berasal dari berbagai penjuru, baik



dari lokal, nasional, maupun internasional. Perampokan-perampokan di perairan Indonesia masih sering terjadi. Kerajaan-kerajaan di nusantara pada zaman dahulu sangat memperhatikan keamanan dan kekayaan laut. Hal ini dapat dilihat dari Kerajaan Majapahit yang dikenal memiliki armada laut yang hebat. Kerajaan ini selalu menjaga keamanan dengan menerjunkan pasukan-pasukan secara langsung dan sembunyi-sembunyi untuk berpatroli.

Beberapa orang Majapahit berlayar memasuki pelabuhan menggunakan sebuah kapal kecil. Saat mereka melihat banyak kapal berlabuh di Tuban, dengan bendera dan payung dibentangkan, mereka mendekati kapal-kapal itu. Mereka memata-matai kapal-kapal itu dan melihat kalau Raja sedang mengadakan pertemuan di dalam kapalnya bersama Adipati. (Salleh, 2013, hlm. 273)

Hal itu merupakan salah satu cara untuk mengarah pada suatu solusi yang bersifat kreatif dengan cara berpikir metaforis. Cara berpikir tersebut memadukan antara imajinasi dan situasi yang mengarah pada suatu pemahaman baru terkait suatu fenomena. Berpikir metaforis cenderung menghasilkan buah pemikiran yang spontanitas, tetapi berdampak positif. Hal ini tampak pada sifat memata-matai yang merupakan bentuk suatu pemikiran untuk menjaga kedaulatan. Meskipun tidak logis, misalnya, ketika mencurigai kedatangan kapal dengan tujuan untuk berdagang, tetapi dengan naluri sebagai mata-mata, itu bisa ditafsirkan akan mengganggu kedaulatan. Tanpa adanya pencarian data lebih lanjut, informasi tersebut tidak bersifat nyata.

Kedatangan rombongan dari Kerajaan Malaka di wilayah Majapahit membuat pasukan laut memasang badan. Kedatangan rombongan dari Kerajaan Malaka dianggap mengganggu. Setelah diselidiki, kedatangan rombongan dari Kerajaan Malaka bermaksud untuk mengadakan prosesi lamaran kepada Kerajaan Majapahit. Sifat curiga diperlukan dalam menjaga kedaulatan. Adanya mata-mata di lautan merupakan usaha yang diterjunkan secara langsung untuk melindungi wilayah perairan dan hal itu yang dilakukan Kerajaan Majapahit dalam menjaga wilayah.

## **PENUTUP**

Berdasarkan paparan pembahasan dapat disimpulkan bahwa *Hikayat Hang Tuah* dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk menumbuhkan semangat bahari. Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai, karakteristik, dan syarat untuk menjadi negara maritim. Hang Tuah dapat dijadikan sebagai representasi tokoh maritim yang dimiliki Indonesia. Karakter Laksamana Hang Tuah yang gagah berani di lautan merupakan inspirasi bagi masyarakat. Selain tokoh pelaut yang hebat, masyarakat Indonesia telah memiliki pranata hubungan dagang. Selain itu, di sektor perekonomian, penarikan pajak bagi pedagang juga merupakan penyumbang devisa. Konsep tersebut telah diterapkan pada masa Kerajaan Melayu.

Dalam mengembangkan kawasan maritim, pembangunan sarana transportasi dan fasilitas pendukung perlu diperhatikan. Dalam *Hikayat Hang Tuah* telah ditunjukkan bahwa pelabuhan akan mendukung proses berdagang. Selain itu,



pelabuhan juga dijadikan tempat berkumpul untuk menyambut dan melepas kepergian raja dan kerabat. Armada transportasi di laut juga menjadi titik yang perlu diperhatikan. Melalui *Hikayat Hang Tuah* pula telah dipaparkan bahwa kapal memegang peran penting dalam menjalin hubungan antarpulau. Diperlukan orang-orang yang terampil untuk membuat dan mendesain kapal. Kearifan lokal masyarakat Melayu tampak ketika membuat dan mendesain kapal dengan menggunakan konsep binatang dan dikerjakan dengan bergotong royong.

Sektor kemaritiman juga memiliki permasalahan pada aspek keamanan dan politik. Menjaga keamanan di sektor maritim dilakukan dengan membangun benteng pertahanan, armada kapal-kapal perang yang memadai. Selain itu, diperlukan mata-mata pula untuk mengawasi kejahatan di laut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ismail. (2013). “Menghidupkan Semula Semangat Nusantara Melalui Pengajian Sejarah Maritim di Alam Melayu”. *Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, Vol 1, No. 2, September 2013, 193—212.
- Anderson, Benedict. (2002). *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
- Buwono X, Hamengku. (2014). “Budaya Maritim Indonesia, Peluang, Tantangan, dan Strategi”. Makalah disajikan pada Road Map Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman Indonesia serta Pencangan Bulan Maritim UGM. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: UGM.
- Djamil, Agus S. (2004). *Al-Qur'an dan Lautan*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Hanif, Hasrul. (2007). “Antagonisme Sosial, Diskonsensus, dan Rantai Ekuivalensi: Menegaskan Kembali Urgensi Model Demokrasi Agonistik”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 11, Nomor 1, Juli 2007, 119—136.
- Murniati. (2017). “Estafet Kesusastraan Melayu Islam”. *Koran Republika*, 19 Februari 2017.
- Prasetyono, E. (2008). “Strategi Pertahanan Indonesia di Masa Depan”. *Jurnal Analisis CSIS*. Vol. 37, No. 3 September 2008, 347—361.
- Pratiwi, Yuni. (2016). “Film Animasi Cerita dengan Konteks Multibudaya untuk Mendukung Pengembangan Kekritisn Penalaran Anak Usia SD”. *Jurnal Litera*. Vol 15, No.2, Oktober 2016, 292—304.
- Ramadhan, Muhammad dan Taslim Arifin. (2013). “Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Geomatika*, Vol 19, No. 2, Desember 2013, 141—146.
- Ratna, Nyoman Kutha. (2010). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salleh, Muhammad Haji. (2013). *Hikayat Hang Tuah*. Jakarta: PT Ufuk Publishing House.
- Setkab. (2016). Pidato di Sidang IMO, Presiden Jokowi Komitmen Jadian Indonesia Poros Maritim Dunia. Diunduh dari <http://setkab.go.id/pidato-di-sidang-imo-presiden-jokowi-komitmen-jadikan-indonesia-poros-maritim-dunia/> pada 21 Februari 2017.
- Setneg.(2009). Indonesia Tuan Rumah 3 Kegiatan Kelautan Internasional (*Online*) , Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Tersedia dalam:





[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3266](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3266) (Diakses 21 Februari 2017).

Silalahi, Harry Tjan. (2005). *Nasionalisme dan Strategi Keamanan Nasional*. Jakarta: CSIS.

Sitohang, J. (2008). *Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut China Selatan: Kepentingan Indonesia di Perairan Natuna*. Jakarta: LIPI Press.

Smith, Anthony D. (1991). *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Blackwell Publishing.

Sukma, R. (2014). "Gagasan Poros Maritim". *Kompas*, 21 Agustus 2014.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Agik Nur Efendi  
Judul Makalah: “Revitalisasi Semangat Bahari untuk Menyongsong Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Melalui Karya Sastra Melayu”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.00  
Moderator : Dra. Yanti Riswara, M.Hum.  
Pencatat : 1. Elvi Suzanti  
2. Inayatussalihah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang melimpah. Konsep kemaritiman atau kelautan sudah digagas sejak pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Konsep ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo dengan nawacitanya.
2. Untuk mengembalikan kekuatan maritim, Indonesia memiliki bekal historis-kultural. Dalam sejarah kultural kerajaan nusantara, sektor kemaritiman mempunyai kedudukan yang kuat dan kukuh, seperti Kerajaan Sriwijaya yang menguasai perdagangan dan pelayaran pada masa itu.
3. Salah satu hikayat yang berkaitan dengan kemaritiman adalah *Hikayat Hang Tuah*. Tulisan ini membicarakan nilai-nilai kemaritiman yang terkandung dalam *Hikayat Hang Tuah*.
4. Ada enam aspek yang dikaji dalam *Hikayat Hang Tuah*, yaitu tokoh, pranata hubungan dagang, penarikan pajak, sarana dan transportasi, kedaulatan dan politik, serta pembuat kapal. Aspek-aspek itu perlu digaungkan kembali untuk memperkuat kemaritiman di Indonesia.
5. Hikayat Hang Tuah menjadi bahan yang relevan untuk diajarkan kepada peserta didik sehingga menimbulkan rasa nasionalisme.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Mappatutu  
Instansi : IKAPI DKI Jakarta

**Pertanyaan:**

Pemerintah harus benar-benar memperhatikan sastra atau cerita rakyat yang berperan dalam pembentukan karakter bangsa. Cerita rakyat harus dimasukkan ke dalam kurikulum, terutama yang berkenaan dengan potensi kita sebagai negara maritim, yakni kurikulum yang mengarah ke kemaritiman.



**Jawaban:**

Saya sangat setuju dengan usulan Bapak. Dalam buku-buku teks lebih banyak dibicarakan masalah daratan daripada lautan. Perlu kerja sama antarpemegang kepentingan untuk menanamkan nilai kemaritiman.

**Penanya 2**

Nama : Mario  
Instansi : Jakarta

**Pertanyaan:**

*Hikayat Hang Tuah* kurang dikenal di Pulau Jawa, hanya di Riau. Oleh karena itu, hikayat tersebut perlu diperkenalkan di luar Riau. Apakah Hikayat Hang Tuah dapat dikenalkan kepada masyarakat nonmaritim, misalnya, masyarakat agraris?

**Jawaban:**

Saya baru mengenal *Hikayat Hang Tuah*. Jika memiliki imaji yang besar mengenai seorang tokoh, seseorang akan mencari tahu tentang tokoh itu meskipun cerita rakyat mengenai tokoh tersebut tidak berasal dari daerahnya.

**Penanya 3**

Nama : Gifari  
Instansi : UN Malang

**Pertanyaan:**

Bagaimana sinkronisasi antara perkembangan masyarakat sekarang dan hikayat Hang Tuah?

**Jawaban:**

Untuk menjadi poros maritim dunia diperlukan armada yang kuat. Hal itu sudah dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menenggelamkan kapal asing ilegal. Dengan demikian, ada sinkronisasi nilai yang terkandung dalam Hang Tuah dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.

**Penanya 4**

Nama : Doni Riadi  
Instansi : Sekolah Arrida Alam

**Pertanyaan:**

Selain Hang Tuah, ada Aru Palaka di Bugis dan tokoh lainnya. Jika kita menginginkan agar Hang Tuah dan tokoh-tokoh lain menginspirasi anak muda, sebaiknya film mengenai tokoh-tokoh itu dibuat, seperti film "Admiral".

**Jawaban:**

Ide Bapak sangat menarik dan relevan untuk diajukan sebagai masukan dalam kongres ini.



**Penanya 5**

Nama : Yoga

Instansi : UIN Malang

**Pertanyaan:**

Relevansi antara sastra Melayu dan Majapahit dalam latar belakang makalah Saudara menurut saya kurang tepat. Lebih baik diungkapkan kekuatan Kerajaan Melayu.

**Jawaban:**

Majapahit disebutkan sebagai bekal historis-kultural. Tidak ada salahnya menyebutkan kerajaan lain selama itu dinyatakan sebagai bekal historis-kultural.

**Isu-Isu Penting:**

Cerita rakyat yang bertemakan tokoh-tokoh yang menginspirasi seperti Hang Tuah sebaiknya difilmkan.



**5. Suara Ekoliterasi Campursari dalam Lagu Hits Didi Kempot 2018**  
**SUARA EKOLITERASI CAMPURSARI**  
**DALAM LAGU HITS DIDI KEMPOT 2018**

**Eka Sugeng Ariadi**  
MTsN 6 Pasuruan  
sugengariadieka@gmail.com

**Abstrak**

Belum banyak penelitian sastra yang membuka tabir pesan lirik lagu berbahasa Jawa (lagu campursari) dengan menggunakan pendekatan teori kritik sastra hijau atau ekokritik. Greg Garrard (2004) mengatakan bahwa teori ini tidak semata-mata memfokuskan pembahasan tentang permasalahan ekologi, tetapi lebih dari itu, bagaimana sebuah karya sastra berkontribusi dalam pencegahan kerusakan alam dan pelestarian ekosistem yang ada. Ada empat konsep ekokritik yang penulis gunakan sebagai pisau analisis lagu campursari karya Didi Kempot. Empat konsep itu digunakan untuk mengetahui ‘suara’ ecoliterasi, seperti polusi atau pencemaran, hutan, bencana, dan bumi. Lagu “Pantai Klayar”, misalnya, adalah upaya sang pencipta dan penyanyi lagu tersebut mempromosikan keindahan alam daerah Pacitan dan sekaligus mengingatkan masyarakat luas akan terjadinya bencana alam yang sering melanda Pacitan dan sekitarnya akibat polusi atau pencemaran. Lagu kedua, yaitu “Jambu Alas”, memberi kritikan lebih luas tentang berkurangnya secara drastis luas hutan Indonesia beserta isinya akibat ulah manusia yang mengeksploitasinya. Lagu ketiga adalah “Banyu Langit” dan “Nunut Ngiyup”. Ada keinginan memopulerkan potensi lokal keindahan alam di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta dan sekaligus berkaca karena terjadinya bencana banjir yang melanda kota Semarang. Lagu terakhir adalah “Dalan Anyar”. Lagu itu untuk mengampanyakan mencintai bumi dan sadar akan segala kebaikannya. Dari kelima lirik lagu ini, suara ecoliterasi karya sastra lagu campursari sebagai warisan budaya lokal memperkuat kejayaan bahasa dan sastra bangsa Indonesia. Makalah ini diharapkan dapat memperkuat penelitian karya sastra lokal dan memperkaya karya sastra global, sekaligus menyokong bidang-bidang lain, seperti bidang ekologi, sosial, politik, dan ekonomi dalam menyuarakan penyelamatan kelestarian dan keindahan alam serta untuk pembentukan karakter manusia yang peduli terhadap lingkungan hidupnya (ekoliterasi).

**Kata-kata kunci:** ecoliterasi, campursari, sastra lokal

**Abstract**

*There are still rarely found literary research which reveal up Javanese song (a.k.a campursari) by using ecocriticism. According to Greg Garrard (2004) this theory is not merely focusing on ecological problems within literary works, yet more than that, discussing on how literary works give significant contribution on preventing nature destructions and sustaining the existence ecosystem. There are four concepts of ecocriticism which are employed to analyze campursari song lyrics by Didi Kempot in order to recognize ecoliteracy voice in it; pollution, wood, disaster, and earth. Pantai Klayar song, for example, is known as an effort to promote the beauty of Pacitan’s nature and as reminder to all people about*



*disasters in which mostly happened in Pacitan and the surrounding caused of human greediness. The second song is Jambu Alas, proposes wide critics on sharp decreasing of wood and its products caused by human exploitation. The third song is Banyu Langit and Nunut Ngiyup, where conveying a message to popularize local nature potention in Gunung Kidul Yogyakarta and to be aware of flood which often happened in Semarang city as well. The last song is Dalam Anyar, which has an aimed to campaign to love earth and its worthiness. Due to all songs, ecoliteracy voice in Javanese song campursari is a wonderful local heritage which able to strengthen the glory of our national language and its literary. This paper is also directed to deepen and enlarging local research in global literature field and as well as to support another subject (such as: ecology, social, politic, economic, etc) to pronounce nature sustainability and constructing human characters who love and care of their universe.*

**Keywords:** *ecoliteracy, campursari, local literature*

## PENDAHULUAN

Pelajar, mahasiswa, atau peneliti belum ada yang meneliti pesan penting sebuah lirik lagu berbahasa Jawa, khususnya lagu campursari. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teori kritik sastra hijau atau ekokritik. Teori ekokritik digunakan untuk mengupas kumpulan puisi, cerpen, dan novel. Kumpulan lirik lagu campursari juga menarik untuk dikupas dan merupakan bagian dari karya sastra yang indah dan tumbuh subur, khususnya di pulau Jawa. Lagu campursari ini sudah populer di beberapa negara yang erat garis keturunan sejarahnya dengan pulau Jawa, misalnya Suriname. Selain itu, dari isi lagu tersebut juga diperoleh pesan-pesan mendalam dari sebuah lirik lagu campursari dengan menggunakan perspektif ekoliterasi. Alasannya, teori sastra satu ini tergolong paling mutakhir di antara kritik sastra lainnya.

*Ecoliteracy* atau ekoliterasi merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda area pembahasan, tetapi sangat erat kaitannya, yaitu *ecology* (*ecological*) dan *literacy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *online* disebutkan bahwa ekologi diartikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan (kondisi) alam sekitarnya (lingkungannya). Literasi berarti kemampuan menulis dan membaca; pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu (KBBI. Kemdikbud.go.id). Gabungan dua kata tersebut membentuk istilah baru, yaitu ekoliterasi yang dimaknai dengan kemampuan untuk memahami sistem alam yang membuat kehidupan di bumi (wikipedia.org).

Dalam dunia teori ekokritik karya sastra, salah satu tokoh sentralnya adalah Greg Garrard dengan bukunya *Ecocriticism*. Garrard menjelaskan bahwa ekokritik (kritik sastra ekologi atau sastra hijau) tidak semata-mata memfokuskan karya dan pembahasannya pada permasalahan ekologi. Lebih dari itu, bagaimana karya sastra ini mampu memberi kontribusi dan pengembangan pada literasi ekologi. "*Ecological literacy means having great awareness to sustain the relationship between the human (culture) and the non-human (nature), throughout human cultural history and entailing critical analysis of the term 'human' itself.*" (2012, hlm. 5)

Maknanya adalah literasi ekologi merupakan gambaran kemampuan manusia yang memiliki kesadaran luar biasa untuk menjaga keberlangsungan hubungan



antara manusia (budaya) dan selain manusia (alam) serta seluruh sejarah kebudayaan manusia dan kebutuhan analisis kritis terhadap istilah manusia itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik menggunakan teori sastra ekoliterasi ini sebagai alat untuk menemukan pesan-pesan penting dari beberapa lirik lagu campursari yang sedang *hits* di negeri ini. Salah satu pencipta lirik lagu sekaligus penyanyinya adalah Didi Kempot (DK), sang maestro campursari yang hingga kini tetap berkarya dengan gigih dan teguh mempertahankan ciri khas bahasa dan sastra Jawa sebagai media untuk mengembangkan karya-karyanya. Itulah mengapa penulis memilih beberapa lagu campursari ciptaan DK sebagai objek penelitian dalam makalah ini. Pesan-pesan yang terkandung dalam lirik lagunya sangat mengena dan mendalam, baik itu berkaitan dengan tema keindahan alam, percintaan, keagamaan, budaya, maupun kritik sosial kehidupan. Dengan menggunakan perspektif ekoliterasi, penulis berasumsi bahwa beberapa lagu yang dipilih memiliki misi utama dalam rangka menyuarakan keindahan alam negeri ini sekaligus mengajak pendengarnya untuk sadar, peduli, dan menjaga anugerah pemberian Tuhan di mana pun mereka berada. Memang, sekilas lalu bila didengarkan, lagu-lagunya tak menampakkan suara ekoliterasi yang nyaring didengar karena ciri khas lirik lagu DK senantiasa dibungkus dengan suasana romantisme sepasang insan manusia yang saling mencintai dan memadu kasih. Oleh karena itu, menjadi sangat penting menemukan suara ekoliterasi dalam lagu-lagu ciptaan DK sebagai pesan utama dalam beberapa lagu campursarinya. Pembaca mampu benar-benar memahami kekuatan budaya lokal dengan segenap bahasa daerahnya sebagai alat atau media penting untuk menggerakkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian alam dan lingkungan sekitar.

Penulis tentu saja berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya analisis karya sastra lokal dan perkembangannya dalam rangka menyokong berkembangnya karya sastra global (nasional dan atau internasional). Hasil penelitian ini juga diharapkan berperan penting dalam memperkuat segi lainnya (di luar karya sastra), seperti menyuarakan perlindungan dan penyelamatan keindahan alam semesta (reservasi ekologi) dan pembentukan karakter manusia yang peduli terhadapnya (ekoliterasi).

## LANDASAN TEORI

Istilah *ecoliteracy* merupakan akronim dari kata *ecology* (*ecological*) dan *literacy*. Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya atau lingkungannya (KBBI.web.id). Literasi berarti kemampuan menulis dan membaca; pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu (KBBI. Kemdikbud.go.id). Wikipedia memberikan arti baru untuk ekoliterasi tersebut sebagai kemampuan untuk memahami sistem alam yang membuat kehidupan di bumi (wikipedia.org).

Dalam dunia karya sastra, konsep ekoliterasi (yang kemudian di Indonesia dikenal dengan kritik sastra ekologi atau sastra hijau) secara komprehensif dikenalkan oleh Greg Garrard dalam bukunya *Ecocriticism (2 edition), the New Critical Idiom*. Garrard (2012) menegaskan, "*Ecological literacy means having great awareness to sustain the relationship between the human (culture) and the non-human (nature), throughout human cultural history and entailing critical analysis of the term "human" itself*" (hlm. 5). Artinya, literasi ekologi merupakan



gambaran kemampuan manusia yang telah memiliki kesadaran untuk (menjaga) keberlangsungan hubungan antara manusia (budaya) dan selain manusia (alam) serta seluruh sejarah kebudayaan manusia dan kebutuhan analisis kritis terhadap istilah manusia itu sendiri. Simpulannya, ekokritik tidak semata-mata memfokuskan pembahasan pada karya sastra dan permasalahan ekologi di dalamnya. Namun, lebih dari itu, fokus juga pada bagaimana karya sastra ini mampu memberi kontribusi signifikan dalam menggerakkan fisik manusia untuk aktif dalam menjaga, merawat dan melestarikan ekologi dari kerusakan, kehancuran, dan kepunahannya.

Ada enam fokus pembahasan yang ditawarkan oleh Greg Garrard sebagai bagian dari pengembangan dari konsep ekoliterasi dalam karya sastra, antara lain (1) polusi/pencemaran, (2) hutan belantara, (3) bencana, (4) perumahan/tempat tinggal, (5) binatang, dan (6) bumi. Dari keenam konsep ini, ada empat konsep yang penulis jadikan alat untuk mengupas beberapa lagu yang pernah diciptakan dan dipopulerkan oleh DK selama berkisah di dunia musik Indonesia. Dengan menggunakan empat konsep tersebut sebagai pisau analisis karya sastra lagu campursari DK, bisa diketahui suara ekoliterasi yang sangat nyaring terdengar dari lirik-lirik lagunya.

## PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas beberapa fokus pembahasan yang ditawarkan oleh Greg Garrard terhadap lagu-lagu campursari karya DK yang sudah atau sedang *hits*. Lagu-lagu tersebut adalah “Pantai Klayar”, “Jambu Alas”, “Banyu Langit” dan “Nunut Ngiyup”, serta “Dalan Anyar”. Dari kelima lirik lagu inilah, suara ekoliterasi dari karya sastra lagu campursari sebagai warisan budaya lokal ternyata mampu memperkuat kejayaan bahasa dan sastra bangsa Indonesia di kancah karya sastra dunia.

### 1. Polusi/Pencemaran

Bagi Garrard, konsep polusi atau pencemaran lingkungan merupakan sumber masalah karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan bersama. Siapa pun, di mana pun, dan kapan pun, semua manusia bisa ambil tindakan dan berperan dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan dari yang terkecil, lingkungan pribadi, hingga ke lingkungan yang lebih luas. Dalam lagu “Pantai Klayar”, lirik *tulung sawangen, sawangen aku*, yang dalam bahasa Indonesia artinya `tolong lihatlah, lihatlah aku`. Aku atau saya yang dimaksud di lirik tersebut merujuk ke seseorang yang dicintai karena memang *sing nandang rindu* `yang sedang rindu/dalam kerinduan`. Sekali lagi, lagu-lagu ciptaan sang maestro campursari ini memang lekat sekali dengan kisah kasih sepasang kekasih, ada rindu dan benci, ada senang dan susah, yang kemudian dilekatkan dengan fenomena keindahan alam suatu tempat yang memang sangat indah, tetapi belum terlalu populer bagi wisatawan asing dari seluruh penjuru dunia. Keindahan alam yang ingin diviralkan kali ini adalah Pantai Klayar yang letaknya di Kota Pacitan, Jawa Timur. Dari lirik *birune segoro Kutho Pacitan* `birunya laut Kota Pacitan`, tentu pendengar lagu ini bisa merasakan bahwa laut Pacitan masih sangat indah dan belum terkontaminasi oleh polusi laut di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa.

Pantai Klayar adalah pantai dengan karakteristik berupa hamparan pasir putih, air laut yang berwarna biru atau bisa juga disebut hijau *tosca*, batu-batu





karang yang memesonakan, dan ombak yang kencang khas laut pantai selatan yang menimbulkan benturan dengan batu karang dan terbentuklah air mancur alami. Semua itu menjadikannya sebagai pantai dengan pesona alam yang indah dan eksotik. Ciri khasnya lagi berupa jajaran batuan karang yang ada di pinggiran pantai. Terlebih lagi, pantai ini terlihat makin elok ketika cuaca sedang cerah sehingga sinergi biru laut demikian manis, membentur halus deretan karang hitam yang berbaris rapi di tepian, dan berpadu dengan pasir putih yang memesonakan. Saat menjelang sore hari, lembayung senja atau *sunset* dengan spektrum jingga kemerahan memeluk erat langit di garis batas barat Klayar. Tebing-tebing *karst* juga menjadi bagian tak terpisahkan dari Klayar. *Karst* merupakan struktur bumi hasil pelarutan batuan gamping, granit, atau batuan pasir lainnya yang hampir sama dengan permukaan gua. Uniknya, gugusan *karst* di Pantai Klayar berukuran raksasa dan berwarna gading pucat dan menjulang tinggi puluhan meter. Angkuh berdiri sekuat apa pun gemuruh laut menderu (diunduh dari <https://pacitanku.com/2012/12/11/pantai-klayar/>).

Oleh karena itu, keindahan Pantai Klayar sangat pas dikaitkan dengan berbagai macam kenangan indah bagi pengunjung pantai ini, *pantai klayar sing nyimpen sewu kenangan* `Pantai Klayar yang menyimpan seribu kenangan`. Pengaitan antara sepasang kekasih yang saling berkeluh rindu dan pesona keindahan Pantai Klayar tentu sangat tepat. Keduanya (unsur ciptaan Tuhan berupa manusia dan alam) menjadi satu kesatuan yang tak mungkin dipisahkan. Keindahan alam sebagai anugerah Tuhan dan manusia diciptakan untuk menikmatinya sekaligus sebagai penjaga, perawat, dan pelestarinya. Tanpa kecerdasan dan kesadaran manusia, pesona alam akan menjadi sesuatu yang biasa dan cenderung liar tak terawat. Sebaliknya, jika manusia benar-benar merawat dan menjaganya, keindahan alam akan makin memesonakan.

Namun, ada apa dengan daerah Pacitan sekarang ini? Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur mengungkapkan kekhawatirannya atas pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) akan memicu bencana ekologi. "Ancaman deforestasi dan bencana ekologi di depan mata," kata Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Ony Mahardika. Dampak bencana yang nyata, menurut Ony, adalah JLS membelah kawasan hutan lindung yang dikelola Perum Perhutani. Hutan lindung menjadi rusak sehingga menyebabkan ancaman terhadap keseimbangan ekosistem. Sementara saat ini, Ony menambahkan, sepanjang pesisir selatan Jawa telah mengalami eksploitasi dari sejumlah perusahaan tambang pasir besi yang diduga tak berizin pula (diunduh dari <https://nasional.tempo.co>).

Manusia modern (manusia zaman *now*) memang ingin terlepas dari kemiskinan yang makin membelit, kemudian mencari segala cara agar bisa keluar dari keadaan tersebut. Namun, cara yang dilakukan cenderung mengeksploitasi alam yang tersedia secara berlebihan. Gunung-gunung dikeruk, tanahnya diambil untuk reklamasi. Hutan digunduli untuk proyek infrastruktur, untuk bangun rumah-rumah, dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah terjadinya polusi, erosi, bencana alam, longsor, kekeringan, dan lain-lain. Dari itu semua, yang menjadi korban tragis adalah anak-cucu kita kelak di kemudian hari. Oleh karena itu, lirik lagu ini mengingatkan bahwa Pantai Klayar dan daerah-daerah di sekelilingnya yang indah, memikat, dan memesonakan layaknya sepasang kekasih yang memadu, selain harus dikampanyekan keindahannya, juga harus disuarakan



perawatan, penjagaan, dan perlindungannya dari kerusakan karena ulah dan keserakahan umat manusia.

## 2. Hutan Belantara

Garrard memberikan konsep hutan dengan arti adanya kumpulan ciptaan yang berupa tumbuh-tumbuhan yang terdiri atas pepohonan lebat yang memiliki lingkungan yang berbeda dengan lingkungan di luar hutan. Tentu hal ini berhubungan erat dengan lingkungan hutan dan manusia dengan segala perbuatannya terhadap hutan. DK dalam lirik lagu berjudul “Jambu Alas” menyinggung konsep yang dipaparkan oleh Garrard tersebut. Gaya lagu DK yang senantiasa membungkus pesan ekologi dengan hubungan percintaan dua insan manusia tentu tidak sekadar memilih judul untuk karyanya.

Kata *jambu* dalam bahasa Indonesia sama pengucapan, tulisan, dan artinya dalam bahasa Jawa, memiliki makna sejenis buah yang kulitnya ada yang merah, hijau, kuning, dan lain-lain yang rasanya pun manis. Jambu alas berarti sejenis buah jambu yang ada di hutan (alas dalam bahasa Indonesia adalah hutan). Dengan judul ini, DK ingin menyuarakan pelestarian hutan secara keseluruhan yang dalam lagu direpresentasikan dengan sebuah jambu. Mengapa buah jambu, bukan durian, mangga, atau yang lain? Hanya DK yang tahu. Pembaca pun bebas menafsirkannya. Satu lirik dalam lagu ini berbunyi *jambu alas kulite ijo* `jambu alas kulitnya hijau`, *sing digagas uwis duwe bojo* `yang dipikirkan sudah punya suami/istri`. Secara implisit, ada seruan untuk menjaga hutan yang masih hijau, masih belantara, dan belum gundul akibat ditebang oleh manusia untuk berbagai macam kepentingan. Hutan adalah aset yang sangat berharga, bukan hanya milik manusia yang hidup sekarang atau generasi 1—2 tahun kedepan. Lebih dari itu, hutan adalah milik semua generasi, bahkan untuk generasi yang belum lahir. Oleh karena itu, jangan serta merta diambil, dihabiskan, dan dijarah hanya untuk kepentingan sesaat. *Jambu alas nduk, manis rasane* `jambu hutan manis rasanya`, artinya hutan dan segala isinya memang sangat menggiurkan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi, tetapi hutan tetaplah bukan milik satu-dua generasi. Hutan adalah milik semua generasi. Persis seperti pesan dalam lirik ini *sing digagas uwis duwe bojo* `yang dipikirkan sudah punya suami/istri`.

Sangat wajar dan sudah sepantasnya, DK menyuarakan lagu lirik ini karena sudah jadi berita dunia bahwa Indonesia tiap tahunnya kehilangan hutan seluas 684.000 hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan alih fungsi hutan. Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) merilis data dari Global Forest Resources Assessment (FRA) bahwa Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil yang berada di urutan pertama. Padahal, Indonesia disebut sebagai *megadiverse country* karena memiliki hutan terluas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia (diunduh dari regional.kompas.com).

## 3. Bencana

Dalam ekokritik, Garrard mengajukan konsep bencana dengan sebuah gambaran keadaan alam dan lingkungan sudah berubah, tidak seperti semula, terjadi kerusakan di sana-sini, merosotnya ekosistem hayati, hancurnya ekosistem dan seringnya terjadi bencana alam yang kesemuanya itu terjadi karena ulah manusia. Terkait dengan konsep tersebut, DK menyinggung keadaan alam di



negeri ini dalam sebuah lagu berjudul “Banyu Langit”. Portal *nationalgeographic.co.id* melansir berita bahwa di sepanjang tahun 2017, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa ada 2.175 kejadian bencana di Indonesia sejak awal tahun hingga 4 Desember 2017. Kejadian itu terdiri atas banjir (737 kejadian), puting beliung (651 kejadian), tanah longsor (577 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (96 kejadian), banjir dan tanah longsor (67 kejadian), kekeringan (19 kejadian), gempa bumi (18 kejadian), gelombang pasang/abrasi (8 kejadian), serta letusan gunung api (2 kejadian). Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa terjadinya bencana makin meningkat dari tahun ke tahun dan 95 persennya adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi cuaca, seperti longsor, kekeringan, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrem (diunduh dari <http://nationalgeographic.co.id>).

DK dengan gaya ekologis romantis menuliskan kepeduliannya dalam lirik lagu “Banyu Langit”, seperti berikut *banyu langit, sing ono duwur kayangan`air langit, yang ada diatas kahyangan`; watu gedhe, kalingan mendunge udan`batu besar, terhalang mendungnya hujan`; telesono atine wong sing kasmaran`basahilah hatinya orang yang kasmaran`; setyo janji, seprene tansah kelingan`setia janji, sampai sekarang masih teringat`. Dalam lirik itu, DK dengan indah menggambarkan fenomena alam yang jatuh dari langit, yaitu air hujan dan benda alam yang ada di bumi, yaitu batu besar. Kedua benda ini menjadi simbol macam-macam bencana yang sering melanda, ada air, ada batu, banjir, tanah longsor, gelombang pasang, dan kekeringan. Demikian pula batu senantiasa mengiringi terjadinya gempa bumi dan gunung meletus. Oleh karena itu, DK mengingatkan agar manusia senantiasa menggunakan hati nuraninya ketika mengeksplorasi alam. Manusia juga harus memegang janji untuk menjaga lingkungan dan alam semesta ini sebagaimana tertuang dalam berbagai aturan, hukum, norma, tata tertib, undang-undang, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya masing-masing.*

Pada lirik berikutnya, DK lebih jelas lagi menyebutkan satu daerah yang butuh perhatian dan perlindungan manusia. *Ademe Gunung Merapi Purbo`dinginnya Gunung Merapi Purba`; melu krungu swaramu, ngomongke opo`turut dengar suaramu, ucapkan apa`; ademe gunung merapi purbo`dinginnya gunung merapi purba`; sing nang Langgran Wonosari Yogyakarta`yang di Langgeran Wonosari Yogyakarta`. Ya, di lingkungan Gunung Merapi Purbo ada danau yang sungguh indah, Danau Nglanggeran di daerah Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dengan memopulerkan keindahan danau tersebut, DK ingin seluruh dunia tahu bahwa ada banyak tempat tujuan wisata yang indah di negeri ini. Selain itu, tentu juga DK ingin mengabarkan kepada siapa pun yang peduli dengan tempat itu untuk menjaganya sebaik mungkin.*

Berikutnya, lagu yang berjudul “Nunut Ngiyup”, DK menyinggung Kota Semarang, Jawa Tengah, yang menjadi langganan banjir. *Semarang kaline banjir`Semarang sungainya banjir`; arep nyabrang wedi kintir`mau menyeberang takut terbawa arus`; nopo kulo angsal mampir`apa saya boleh masuk`; kentongan ampun dititir`kentongan jangan dipukul`. Banjir rob Semarang bulan Februari 2018 menenggelamkan Kota Semarang dan sekitarnya. Tentu kerugian yang harus ditanggung rakyat sangat besar dan tak terhitung dalam angka-angka rupiah. Oleh*



karena itu, melalui lagu ini DK mengingatkan bencana ini harus segera dicarikan solusinya. Jangan sampai ada korban jiwa akibat hanyut dalam derasny banjir.

#### 4. Bumi

Fokus pembahasan yang terakhir adalah bumi. Garrard mendefinisikan gambaran bumi dengan apa saja yang ada di dalam bumi, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda-benda mati, sekaligus upaya-upaya manusia dalam melestarikannya dengan berbagai macam cara, yaitu penghijauan, reboisasi, normalisasi, dan lain-lain. Kali ini DK melukiskan dalam lagunya berjudul “Dalam Anyar (Terminal Kertonegoro)”. *Dalam anyar* artinya jalan baru, jalan baru yang ada di Terminal Kertonegoro, sebuah nama terminal di Kota Ngawi, kota paling barat di Jawa Timur, kota yang luas dan terkenal sebagai lumbung padi Provinsi Jawa Timur dan nasional. Perhatikan liriknya, *kembang tebu sing kabur kanginan* `bunga tebu yang berhamburan kena angin`; *saksi bisu sing dadi kenangan* `saksi bisu yang jadi kenangan`; *prasetyamu kui mung kiasan* `kesetiaanmu hanya kiasan`, *tresnamu saiki wis ilang* `cintamu sekarang hilang`. Dalam lirik romantis yang selalu dikaitkan dengan keadaan ekosistem sebuah daerah, DK menggambarkan kemakmuran kota ini tidak hanya pada tanaman padi, tetapi juga tanaman tebu. Kemakmuran tanaman tebu ini terasa sangat kental ketika disebutkan berhamburan karena tertiuip angin dan keindahannya menjadi kenangan bagi yang melewatinya. Bisa disimpulkan bahwa alam telah memberikan kebahagiaan bagi manusia.

Lirik berikutnya dipertegas lagi tentang peran alam dalam menyejahterakan kehidupan manusia. *Kembang tebu sing neng sawah Nggrudo* `kembang tebu yang di sawah Nggrudo/Ngawi`; *ora garing senadyan mongso ketiga* `tak kering meski musim kemarau`. Sangat jelas bagaimana DK menggambarkan kota ini benar-benar tak salah menjadi lumbung padi daerah dan nasional. Bahkan, tanaman tebu di sawah-sawah tidak menjadi kering kerontang dan mati ketika musim kemarau. Tanaman ini tetap tumbuh dan menjadi andalan manusia dalam menyambung kehidupannya. Oleh karena itu, manusia wajib bersyukur dan menjaga kelestarian sawah-sawah serta ekosistem di sekitarnya.

Di sisi lain, DK sedikit menyindir tentang kondisi jalan raya di daerah ini. Penulis sendiri sangat sering melewati jalan-jalan raya di Kota Ngawi dan benar banyak jalan baru yang sudah mulus untuk dilewati, apalagi di jalanan sekitar terminal Kertonegoro. DK mengabadikannya dalam lirik *neng dalam anyar kowe karo sopo* `di jalan baru kau dengan siapa`; *neng kulon Terminal Kertonegoro Ngawi* `di sebelah barat Terminal Kertonegoro Ngawi`. Namun, keadaan ini tak berlangsung lama. Banyak kemudian jalan-jalan baru menjadi rusak, bergelombang, dan berlubang. Memang banyak hal menjadi penyebabnya, bisa karena fenomena gerakan tanahnya yang labil atau karena fenomena manusia yang dalam pengerjaannya yang kurang amanah.

#### PENUTUP

Gaung ekoliterasi dalam karya sastra sangat layak untuk terus dimasifkan, baik melalui puisi, cerita pendek, novel, maupun lagu, khususnya yang benar-benar berasal dari karya sastra lokal seperti lagu DK yang mayoritas berbahasa Jawa. Dengan menggunakan kritik sastra ekokritik yang dikonsepsi oleh Greg Garrard, penulis menemukan pesan utama dari beberapa lirik lagu campursari DK,



yaitu benar-benar menyuarakan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem alam yang telah memberikan banyak sekali manfaat kepada manusia. DK, seorang maestro campursari, pencipta sekaligus penyanyi lagu-lagu Jawa di negeri ini, ternyata sangat piawai dalam membalut misi-misi ekoliterasi dalam lirik-lirik romantis percintaan insan manusia.

Dari empat konsep ekoliterasi yang penulis fokuskan sebagai pisau analisis karya sastra lagu campursari DK, dapat diketahui bahwa suara ekoliterasi yang ada di dalamnya sangat kuat dan kental sekali. Lagu “Pantai Klayar” ternyata menjadi pemberitahuan pada dunia akan keindahan alam daerah Pacitan dan sekaligus pengingat akan adanya ancaman yang besar, yaitu terjadinya bencana alam yang sering melanda Pacitan dan sekitarnya karena polusi atau pencemaran akibat ulah manusia.

Pada lagu kedua, yaitu “Jambu Alas”, DK memberi kritikan lebih luas lagi kepada ekosistem hutan di negeri ini. Makin hari makin berkurang drastis luas wilayah serta isi hutan kita akibat ulah manusia dalam mengeksploitasinya. Lagu ketiga adalah “Banyu Langit” dan “Nunut Ngiyup”, DK kembali ingin memopulerkan potensi lokal keindahan alam di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta dan sekaligus berkaca dari terjadinya bencana banjir yang telah menjadi langganan di Kota Semarang.

Lagu terakhir adalah “Dalan Anyar”. DK mengampanyekan kepada manusia untuk mencintai bumi dan segala kebaikannya dengan menikmati hasil bumi dan mensyukurinya dengan cara merawat bumi sebaik-baiknya. Kerusakan daratan tidak semata-mata disebabkan sering terjadinya bencana alam, tetapi juga ada andil besar dari tangan-tangan manusia yang kurang amanah dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi hasil bumi.

Dari kelima lirik lagu inilah, suara ekoliterasi dari karya sastra lagu campursari sebagai warisan budaya lokal bisa disebarluaskan untuk memperkuat kejayaan bahasa dan sastra bangsa Indonesia. Penulis berharap makalah ini dapat makin memperkuat perkembangan karya sastra lokal dalam perannya menyokong karya sastra global sekaligus perannya dalam bidang lain (dalam hal ini bidang ekologi), yaitu menyuarakan penyelamatan kelestarian dan keindahan alam semesta serta pembentukan karakter manusia yang peduli terhadap lingkungan hidupnya (ekoliterasi).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barton, D., Hamilton, M. dan Ivanic, R. (ed). (2000). *Situated Literacies: Reading and Writing in Context*. London: Routledge.
- Barton, D. dan Hamilton, M. (2000). ‘Literacy Practices’ dalam D. Barton, M. Hamilton dan R. Ivanic (ed), *Situated Literacies: Reading and Writing in Context*. London: Routledge, 7–15.
- Garrard, Greg. (2012). *Ecocriticism (2 edition), the New Critical Idiom*. New York: Routledge.
- Kemdikbud. (2017). “Strategi Literasi dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama, Materi Penyegaran Instruktur Kurikulum 2013”. Jakarta: Satgas GLS Ditjen Dikdasmen
- Pahl, K., dan Rowsell, J. (2005). *Literacy and Education London*: Paul Chapman Publishing.



<https://kbbi.web.id/ekologi>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi>

<https://nasional.tempo.co/read/649399/jalur-selatan-jawa-timur-dituding-memicu-bencana-ekologi>

<https://pacitanku.com/2012/12/11/pantai-klayar/>

<http://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2017/12/7-bencana-alam-terbesar-di-indonesia-sepanjang-tahun-2017>

Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological\\_literacy](http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_literacy).



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 1 Kelompok 9**

- Pembicara : Eka Sugeng Ariadi  
Judul Makalah : “Suara Ekoliterasi Campursari dalam Lagu *Hits* Didi Kempot 2018”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 08.00—09.30  
Moderator : Dr. Tengku Syarfina, M.Hum.  
Pencatat : 1. Triwulandari  
              2. Winci Firdaus

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Masih belum banyak penelitian sastra yang membuka tabir pesan lirik lagu berbahasa Jawa (lagu campursari) dengan menggunakan pendekatan teori kritik sastra hijau atau ekokritik.
2. *Ecoliteracy* atau ekoliterasi merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda area pembahasan, tetapi sangat erat kaitannya, yaitu *ecology* (*ecological*) dan *literacy*.
3. Literasi ekologi merupakan gambaran kemampuan manusia yang memiliki kesadaran luar biasa untuk menjaga keberlangsungan hubungan antara manusia (budaya) dan selain manusia (alam) serta seluruh sejarah kebudayaan manusia dan kebutuhan analisis kritis terhadap istilah manusia itu sendiri.
4. Ada enam fokus pembahasan yang ditawarkan oleh Greg Garrard sebagai bagian dari pengembangan konsep ekoliterasi dalam karya sastra, yaitu (1) polusi/pencemaran, (2) hutan belantara, (3) bencana, (4) perumahan/tempat tinggal, (5) binatang, dan (6) bumi.
5. Dalam bagian ini akan dibahas beberapa fokus pembahasan yang ditawarkan oleh Greg Garrard terhadap lagu-lagu campursari karya Didi Kempot (DK) yang sudah atau sedang *hits*. Lagu-lagu tersebut adalah “Pantai Klayar”, “Jambu Alas”, “Banyu Langit”, “Nunut Ngiyup”, dan “Dalam Anyar”. Dari kelima lirik lagu itulah, suara ekoliterasi dari karya sastra lagu campursari sebagai warisan budaya lokal ternyata mampu memperkuat kejayaan bahasa dan sastra bangsa Indonesia di kancah karya sastra dunia.
6. Gaung ekoliterasi dalam karya sastra sangat layak untuk terus dimasifkan, baik melalui puisi, cerita pendek, novel, maupun lagu, khususnya yang benar-benar berasal dari karya sastra lokal, seperti lagu DK yang mayoritas berbahasa Jawa. Dengan menggunakan kritik sastra ekokritik yang dikonseptkan oleh Greg Garrard, penulis menemukan pesan utama dari beberapa lirik lagu campursari DK, yaitu benar-benar menyuarakan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem alam yang telah memberikan banyak sekali manfaat kepada manusia. DK, seorang maestro campursari, pencipta sekaligus penyanyi lagu-lagu Jawa di negeri ini, ternyata sangat piawai dalam membalut misi-misi ekoliterasi dalam lirik-lirik romantis percintaan insan manusia.
7. Dari empat konsep ekoliterasi yang penulis fokuskan sebagai pisau analisis karya sastra lagu campursari Didi Kempot, dapat diketahui bahwa suara



- ekoliterasi yang ada di dalamnya sangat kuat dan kental sekali. Lagu “Pantai Klayar” ternyata menjadi pemberitahuan pada dunia akan keindahan alam daerah Pacitan dan sekaligus pengingat akan adanya ancaman yang besar, yaitu bencana alam yang sering melanda Pacitan dan sekitarnya karena polusi atau pencemaran akibat ulah manusia.
8. Pada lagu kedua, yaitu “Jambu Alas”, DK memberi kritikan lebih luas lagi pada ekosistem hutan di negeri ini. Makin hari makin berkurang drastis luas wilayah serta isi hutan kita juga akibat ulah manusia dalam mengeksploitasinya. Dalam lagu “Banyu Langit” dan “Nunut Ngiyup”, DK kembali ingin memopulerkan potensi lokal keindahan alam di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta dan sekaligus berkaca pada peristiwa bencana banjir yang telah menjadi langganan di Kota Semarang.
  9. Dalam lagu terakhir, “Dalan Anyar”, DK mengampanyekan kepada manusia untuk mencintai bumi dan segala kebaikannya serta menikmati hasil bumi dan mensyukurinya dengan cara merawat bumi sebaik-baiknya. Kerusakan daratan tidak semata-mata disebabkan terjadinya bencana alam, tetapi juga ada andil besar dari tangan-tangan manusia yang kurang amanah dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi hasil bumi.
  10. Dari kelima lirik lagu itulah suara ekoliterasi dari karya sastra lagu campursari sebagai warisan budaya lokal dapat disebarluaskan untuk memperkuat kejayaan bahasa dan sastra bangsa Indonesia. Harapan penulis makalah ini adalah perkembangan karya sastra lokal makin kuat dalam menyokong karya sastra global sekaligus berperan dalam bidang lain (dalam hal ini bidang ekologi), yaitu menyuarakan penyelamatan kelestarian dan keindahan alam semesta serta pembentukan karakter manusia yang peduli terhadap lingkungan hidupnya (ekoliterasi).

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Eko Sugiarto

Instansi : STIPRAM Yogyakarta

#### **Pertanyaan:**

Ekoliterasi adalah sesuatu yang baru. Bagaimana menjelaskannya dengan bahasa yang singkat sehingga konsep literasi mudah dipahami oleh masyarakat umum?

#### **Jawaban:**

Ekoliterasi adalah kesadaran seorang manusia untuk mengeksplorasi, menjaga, dan melestarikan alam. Hal itu kemudian dapat dibuat dalam bentuk novel, lagu, dan sebagainya. Didi Kempot merupakan salah satu seniman yang berhasil mengaktualisasikan alam dalam lagunya.

#### **Penanya 2**

Nama : Agik Nur Effendi

Instansi : Universitas Negeri Malang

#### **Pertanyaan:**

1. Apakah ekoliterasi sama dengan *ecocriticism*?





2. Apakah teori ekoliterasi ini berkaitan dengan *ecocriticism*?

**Jawaban:**

1. Ekoliterasi merupakan bagian dari *ecocriticism*.
2. Ya. Keduanya sangat berkaitan.

**Penanya 3**

Nama : Sutrisno Wibowo  
Instansi : UNY

**Pertanyaan:**

Apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam penelitian ini? Dalam penelitian ini tidak hanya dibahas tentang lingkungan. Literasi pun sangat berkembang, tidak hanya mencakup baca tulis?

**Jawaban:**

Yang ingin dicapai dalam ekoliterasi ini adalah penataan yang rapi terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Manusia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan melestarikannya.

**Penanya 4**

Nama : Sarwiji Suwandi  
Instansi : Universitas Negeri Sebelas Maret

**Pertanyaan:**

Apakah fokus aspek literasi yang ada dalam lirik lagu Didi Kempot memuat aspek sikap, perilaku, dan pengetahuan (*knowledge*)?

**Jawaban:**

Ekoliterasi belum masuk dalam buku teks pelajaran. Hal itu akan dielaborasi oleh peneliti.

**Penanya 5**

Nama : Rangga Asmara  
Instansi : Untidar

**Pertanyaan:**

Data ekoliterasi tampak dipaksakan, contohnya data “Lagu Alas” memiliki banyak interpretasi, bahkan berbeda setiap orang? “Banyu Langit” diinterpretasikan sebagai bencana banjir, padahal kata tersebut hanya memiliki makna hujan. Apakah interpretasi data yang diungkapkan itu sudah tepat?

**Jawaban:**

Peneliti belum memastikan hal itu dan akan menjadikannya sebagai rekomendasi terkait tambahan data pada penelitian yang akan datang. Peneliti hanya berusaha untuk menginterpretasikannya sendiri.



**Penanya 6**

Nama : Rifari

Instansi : Univeristas Negeri Malang

**Pertanyaan:**

Peneliti terlalu memaksakan data kajian. Aspek historis lagu pun harus diperhatikan oleh peneliti?

**Jawaban:**

Peneliti hanya berusaha menginterpretasikannya sendiri dan memang banyak bencana yang berkaitan dengan unsur lagu Didi Kempot.

**Isu-Isu Penting:**

Ekoliterasi perlu terus dikembangkan, bukan hanya dalam bentuk lagu, melainkan juga dalam media lainnya.



**6. Kajian Bentuk dan Makna Sonteng Pertanian pada Masyarakat Dusun Kemiri, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta**

**KAJIAN BENTUK DAN MAKNA *SONTENG* PERTANIAN  
PADA MASYARAKAT DUSUN KEMIRI, GUNUNGKIDUL, DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*Study of Form and Meaning of Agriculture Sonteng  
In Kemiri Society, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta*

**Itaristanti**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
itaristanti@yahoo.com

**Abstrak**

Penelitian ini merupakan sebuah kajian mengenai bentuk dan makna *sonteng* (mantra) di bidang pertanian pada masyarakat Dusun Kemiri, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kedua elemen tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan metode cakap/wawancara dengan teknik simak bebas libat cakap dan teknik cakap bertemu muka. Keduanya kemudian dilanjutkan dengan teknik rekam dan catat. Analisis data dilakukan dengan metode padan translasional. Penyajian hasil analisis data dilakukan dengan metode informal atau deskriptif, yaitu penyajian dengan kata-kata biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sonteng* dibentuk dengan kombinasi bunyi-bunyi yang indah atau eponi dan repetisi. Dalam aspek morfologi, terdapat bentuk-bentuk verba yang menyatakan perintah. Kalimat yang membangunnya berjenis kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat suruh/perintah. Selain itu, terdapat pula bentuk kalimat negasi. Kalimat-kalimat tersebut dibangun oleh leksikon yang berasal dari bahasa Jawa, Arab, dan Sanskerta. Sementara itu, kajian terhadap makna menunjukkan pandangan masyarakat Kemiri terhadap dunia, leluhur, dan Tuhan. Mereka meyakini bahwa segala usaha sangat bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga tetap menghormati leluhurnya sebagai bentuk menjaga keseimbangan alam semesta.

**Kata-kata kunci:** *sonteng*, relativitas bahasa, dan semiotika

**Abstract**

*This research is a study of form and meaning of agriculture sonteng (spell), in Kemiri society, Gunungkidul, DIY. The goal is to describe of both elements. Data collection are done by observation method and interview method with uninvolved conversation observation technique and face to face interview technique. Both of them are completed by recording and writing technique. Analyzing of the data are done by translational identity method. Presentation of the data is finished by an informal or descriptive method. This research show that some sonteng are formulated by beautiful sound combination or euphony. The morphological aspect, there are some imperative verb. Declarative, interrogative, and imperative sentences are shown in this spell. On the other hand, there are also some negation sentences. The sentence are constructed by Javanese, Sanskrit, and Arabic lexicon. Meanwhile, the study of meaning shows the point of view of Kemiri society about the world, the ancestors, and The God. They believe that everything*



*depends on The God. They also respect to the ancestors as a form of balancing the universe.*

**Keywords:** *sonteng, language relativity, semiotics*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar masyarakatnya adalah agraris. Sebagian besar penduduknya memenuhi kebutuhan hidup dengan bertani. Faktor alam telah mendukung kegiatan agraria tersebut, misalnya kondisi wilayah dan iklim. Adanya gunung berapi, banyaknya sungai, danau, serta topografi yang berupa pegunungan dan dataran tinggi sangat berperan bagi masyarakat agraris, begitu pula dengan kondisi di Dusun Kemiri. Dusun Kemiri merupakan salah satu dusun yang termasuk dalam Desa Kemiri, sebuah desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagian besar warga masyarakat Dusun Kemiri mengandalkan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun jenis tanaman yang mereka kembangkan adalah tanaman palawija, yang meliputi padi, jagung, kacang-kacangan, dan ketela pohon. Topografi daerah tersebut adalah pegunungan dengan jenis sawah tadah hujan.

Dalam budaya pertanian di dusun tersebut, terdapat satu macam tradisi, yaitu tradisi permulaan menanam padi, memberantas hama padi, dan menuai padi. Tradisi menuai padi dipimpin oleh seorang dukun. Dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, dan memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna, dsb.) (KBBI, 1995, hlm. 246). Dukun melafalkan mantra tersebut. Mantra merupakan perkataan atau ucapan yang memiliki kekuatan gaib (misalnya dapat menyembuhkan dan mendatangkan celaka); susunan kata berunsur puisi (seperti rima, irama) yang dianggap mengandung kekuatan gaib (KBBI, 1995, hlm. 629). Mantra dalam masyarakat Dusun Kemiri disebut dengan *sonteng*. Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa di dalam mantra terkandung bahasa. Bahasa merupakan bagian dari budaya. Dengan memahami bahasa yang digunakan dalam mantra tersebut, kita dapat memahami budaya yang melingkupinya.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana bentuk *sonteng* pertanian pada masyarakat Dusun Kemiri, Gunungkidul, DIY. Kedua, apa makna yang terkandung dalam *sonteng* pertanian tersebut. Berdasarkan dua rumusan masalah itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk *sonteng* pertanian pada masyarakat Dusun Kemiri, Gunungkidul, DIY dan mengetahui makna yang terkandung dalam *sonteng* pertanian tersebut.

## **LANDASAN TEORI**

Salah satu aspek etnolinguistik yang menonjol adalah teori mengenai relativitas bahasa. Relativitas bahasa merupakan pandangan yang menyatakan bahwa bahasa seseorang menentukan pandangan dunianya melalui kategori gramatikal dan klasifikasi semantis yang ada dalam bahasa itu dan yang diwarisi bersama kebudayaannya (Kridalaksana, 2011, hlm. 209).

Wilhelm Von Humboldt berhipotesis bahwa pola unik setiap bahasa menyandikan pandangan yang berbeda mengenai dunia (dalam Keesing, 1989,



hlm. 87). Hipotesis tersebut kemudian dikembangkan oleh seorang ahli antropologi bernama Edward Sapir. Sapir menyatakan bahwa dunia tempat masyarakat yang berbeda tinggal adalah dunia yang berbeda. Pola-pola bahasa sangat penting dalam membentuk berbagai dunia budaya yang berbeda. Teori ini kemudian dikembangkan lagi oleh Benyamin Lee Whorf. Whorf menyatakan bahwa bahasa-bahasa Eropa membentuk tidak saja cara-cara berbicara tentang dunia, tetapi juga membentuk model tentang dunia (Keesing, 1989, hlm. 88).

Steinberg menyatakan bahwa ada empat formulasi mengenai hubungan antara bahasa, pikiran, dan budaya (2001, hlm. 245). Pertama, ucapan merupakan hal yang esensial bagi pikiran. Kedua, bahasa merupakan hal yang esensial bagi pikiran. Ketiga, bahasa menentukan atau membentuk persepsi kita tentang alam. Keempat, bahasa menentukan atau membentuk pandangan dunia kita. Senada dengan itu, Pateda (1990, hlm. 30) menyatakan bahwa bahasa digunakan untuk mengungkapkan pikiran. Seseorang yang sedang memikirkan sesuatu kemudian ingin menyampaikan hasil pemikiran itu menggunakan alat, yaitu bahasa. Bahasa juga diperlukan untuk membicarakan kebudayaan, kegiatan, dan masalah yang berhubungan dengan etnik. Unsur-unsur budaya yang relevan, misalnya pakaian dan kegiatan ritual, dapat ditemukan cara pengungkapannya dalam bahasa tertentu dan diyakini tidak dapat dinyatakan dalam bahasa lain. Kebudayaan suatu bangsa tidak mungkin dapat dikaji tanpa mengkaji bahasa bangsa itu (Cahyono, 1995, hlm. 425).

Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari lambang-lambang dan tanda-tanda (Kridalaksana, 2011, hlm. 219). Saussure (1966, hlm. 66) menyatakan bahwa bahasa merupakan sistem tanda. Tanda terdiri atas dua hal penting, yaitu konsep (*concept*) dan citra bunyi (*sound image*). Selanjutnya, Saussure menjelaskan bahwa unit linguistik adalah entitas ganda yang dibentuk melalui hubungan dua ikhwal tersebut. Tanda linguistik menyatu, bukan hanya sebuah benda dan nama, tetapi sebuah konsep dan citra bunyi. Citra bunyi bukanlah bunyi material atau hal yang sangat fisik, tetapi kesan psikologis bunyi tersebut, kesan yang masuk akal kita. Bentuk bahasa dalam *sonteng* (mantra) juga merupakan sistem tanda. Tanda-tanda itu memungkinkan manusia berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta.

Kedua teori tersebut digunakan untuk mengkaji bentuk dan menggali makna yang terkandung dalam *sonteng* (mantra) yang berkaitan dengan pertanian pada masyarakat Dusun Kemiri, Desa Kemiri, Gunungkidul, DIY. Mantra yang berkaitan dengan bidang pertanian tersebut meliputi mantra dalam permulaan menanam padi, memberantas hama padi, dan mantra pada upacara menuai padi.

Kata *mantra* berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*, mantra adalah teks suci, doa, dan formula magis (Zoetmulder, 2000, hlm. 647). Dalam *Kamus Antropologi* disebutkan bahwa mantra adalah suatu ucapan dari kalimat-kalimat suci yang merupakan doa dan sering digunakan oleh para pendeta atau dukun; mantra mempunyai kekuatan gaib (Suyono, 1985, hlm. 239).

Mantra dalam masyarakat Kemiri disebut *sonteng*. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, kata *sonteng* berarti sebuah 'permohonan'. Mantra berisikan bahasa sehingga penting dalam penelitian ini untuk menjelaskan keterkaitan antara mantra dan bahasa. Mantra merupakan perkataan atau ucapan



yang dapat mendatangkan daya gaib; mantra merupakan susunan kata berunsur irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib (KBBI, 1995, hlm. 629).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis data. Data penelitian berupa tuturan-tuturan *sonteng*. Pengumpulannya dilakukan dengan metode simak dan metode wawancara. Metode simak dilakukan dengan teknik simak bebas libat cakap. Metode wawancara dilakukan dengan teknik cakap semuka. Keduanya kemudian dilanjutkan dengan teknik rekam dan catat. Instrumen yang digunakan adalah alat perekam, alat tulis, dan daftar pertanyaan wawancara. Prosedur pengumpulan data dimulai dengan menyimak penuturan *sonteng* oleh narasumber sambil dilakukan perekaman, kemudian dilanjutkan dengan wawancara.

Tahap analisis data dilakukan dengan metode padan translasional. Metode padan translasional adalah metode padan yang alat penentunya adalah bahasa lain. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menerjemahkan *sonteng* dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia guna mempermudah analisis data. Sementara itu, tahap penyajian hasil analisis data dilakukan dengan metode informal. Metode informal adalah metode penyajian hasil analisis data dengan kata-kata biasa (Sudaryanto, 1993). Metode ini disebut juga dengan metode deskriptif.

## PEMBAHASAN

### 1. Bentuk *Sonteng* Pertanian pada Masyarakat Dusun Kemiri, Desa Kemiri, Gunungkidul, DIY

*Sonteng* yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan aktivitas dalam bidang pertanian, yaitu *sonteng* permulaan menanam padi, *sonteng* untuk mengusir hama padi, dan *sonteng methik pari* atau ‘menuai padi’.

#### a. Aspek Fonologis

Salah satu aspek pembangun struktur dalam *sonteng* adalah aspek fonologis. *Sonteng* termasuk dalam jenis sastra lisan. *Sonteng* merupakan produk kesusastraan sehingga ciri fonologis yang menonjol adalah aspek perpaduan bunyi. Bunyi-bunyi tersebut berkaitan dengan sistem fonologi bahasa Jawa karena sebagian besar *sonteng* menggunakan bahasa Jawa.

Bahasa Jawa memiliki enam fonem vokal, yaitu /i, e, |, a, u, o/. Sementara itu, konsonan yang terdapat dalam bahasa Jawa ada 23 buah, yaitu /p, b, m, f, w, t, d, n, l, r, ʈ, d, s, z, c, j, ñ, y, k, g, G, h, dan ?/ (Wedhawati dkk., 2001, hlm. 41). Fonem-fonem tersebut membentuk perpaduan bunyi dalam *sonteng*.

Percampuran bunyi-bunyi akan menimbulkan dua macam bunyi, yaitu eponi (*euphony*) dan kakofoni (*cacophony*). Pradopo (2005, hlm. 27) menyatakan bahwa eponi adalah kombinasi bunyi-bunyi yang merdu, sedangkan kakofoni adalah kombinasi bunyi yang tidak merdu, parau, dan penuh bunyi [k, p, t, s]. Selanjutnya, eponi dibentuk oleh bunyi-bunyi vokal [a, e, i, o, u], bunyi-bunyi konsonan bersuara [b, d, g, j], bunyi liquida [r, l], dan bunyi sengau [m, n, ng, ny]. Bunyi-bunyi tersebut dapat menimbulkan bunyi yang merdu dan berirama. Orkestrasi bunyi yang merdu dapat digunakan untuk menggambarkan perasaan



mesra, kasih sayang, dan hal-hal yang menggembirakan. Sementara itu, kakofoni menggambarkan suasana yang tidak menyenangkan. Sebagian besar bunyi yang mendominasi dalam *sonteng* membentuk efonem atau bunyi-bunyi yang merdu.

Aspek fonologis dalam *sonteng* juga terlihat di dalam irama. Irama adalah gerak yang teratur (Pradopo, 2005, hlm. 40). Irama dibagi menjadi dua, yaitu metrum dan ritme. Metrum adalah irama yang tetap menurut pola tertentu. Irama di dalam *sonteng* tidak termasuk ke dalam jenis ini. Irama di dalam *sonteng* termasuk ke dalam jenis ritme. Ritme adalah irama yang disebabkan oleh pertentangan atau pergantian bunyi tinggi rendah secara teratur, tetapi bukan merupakan jumlah suku kata yang tetap, melainkan hanya menjadi gema dendang sukma penyairnya (Pradopo, 2005, hlm. 40). Di dalam *sonteng* terdapat repetisi bunyi atau bunyi yang diulang-ulang. Repetisi bunyi dimanfaatkan untuk menimbulkan efek-efek tertentu, misalnya kesakralan. Pola reduplikasi bunyi dalam *sonteng* di bawah ini tampak dominan dalam setiap baris, yaitu dalam petikan *sonteng* memetik padi.

(1) *Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pemethik*

*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pengracik*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pengagem*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penyeleh*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pengayar-ayar*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pengunduk-unduk*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pembukak*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penjereng*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pemulung*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pengunduk-unduk*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pembukak*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penguthut-uthut*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penucuk*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penyeleh*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penumpuk*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penutup*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pembukak*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pengindhut*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penggejlug*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penginter-inter*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penosoh*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pengentas*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penaker*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pengekum*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pengetus*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penutup*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pembukak*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penapung*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penutup*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pembukak*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pengaru*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penutup*



*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pembukak*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penapung*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penutup*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pembukak*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pengebluk*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pengebut*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penggulug-ulug*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Penggulug-ulug*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri Pemuluk*

Ujaran-ujaran yang hampir sama seperti di atas diulang hingga 41 kali. Perulangan ujaran tersebut mengakibatkan pula perulangan dalam hal bunyi. Kombinasi-kombinasi bunyi tersebut menghasilkan perpaduan bunyi yang indah. Kombinasi tersebut didukung pula oleh unsur suprasegmental yang meliputi nada, intonasi, jeda, dan tekanan. Nada-nada tersebut kemudian membentuk intonasi. Intonasi adalah pola perubahan nada yang dihasilkan oleh pembicara pada waktu mengucapkan kalimat atau bagian-bagiannya (Kridalaksana, 2011, hlm. 95). Dalam pengucapan suatu kalimat dengan intonasi yang berbeda-beda tersebut, ada kalanya kita berhenti sebentar. Hentian itu disebut dengan jeda atau *pause*. Pembacaan *sonteng* juga dapat dirasakan kekuatan magisnya melalui tekanan dalam pembacaan. Tekanan atau aksentuasi adalah kekuatan yang lebih besar di dalam artikulasi pada bagian ujaran atau keras lembutnya pengucapan bagian ujaran (Kridalaksana, 2011, hlm. 237).

Intonasi yang digunakan oleh pembaca *sonteng* atau dukun, antara lain intonasi turun, intonasi naik, dan intonasi suruh. Intonasi turun digunakan ketika mengucapkan kalimat berita. Intonasi naik digunakan ketika mengucapkan kalimat tanya. Intonasi perintah/suruh digunakan ketika mengucapkan kalimat suruh. Berikut adalah contoh *sonteng* yang dibaca dengan intonasi turun.

- (2) *Lembing ying-ying ora ana*  
*Walang sangit ora ana*  
*Walang angin ora ana*  
*Ayang-ayang ora ana*  
*Anane walang beras*  
*Walang beras tur aos*  
*Aos seka kersaning Allah*  
*`Lembing ying-ying tidak ada*  
*Belalang sangit tidak ada*  
*Belalang angin tidak ada*  
*Ayang-ayang tidak ada*  
*Adanya adalah belalang beras*  
*Belalang beras yang berisi*  
*Berisi atas kehendak Allah`*

*Sonteng* di atas adalah *sonteng* untuk menghilangkan hama padi. Ujaran tersebut memberikan informasi bahwa *lembing ying-ying*, *walang sangit*, *walang angin*, dan *ayang-ayang* tidak ada. Yang diharapkan adalah beras yang berisi. Kalimat-kalimat di atas diucapkan dengan intonasi turun.





## b. Aspek Morfologis

Permohonan yang terkandung dalam *sonteng* pertanian sebagian besar diwujudkan dengan kalimat suruh. Oleh karena itu, di dalam *sonteng* ini sering dijumpai imbuhan yang menyatakan perintah. Imbuhan tersebut adalah *-a* yang dapat dijumpai dalam petikan berikut.

*Ibu Bumi, Bapa Kuasa*

*Sira **tangia!***

*Igsun titip wiji pari ana tegal kepanasan*

***Oyota** kawat, **godhonga** blabag*

*Tur landhung, tur dadi, tur aos*

*Aos seka kersaning Allah*

*`Ibu Bumi, Bapa Kuasa*

*Kamu bangunlah!*

*Saya titip biji padi di tegal yang panas*

*Berakarliah kawat, berdaunlah lebar seperti blabag*

*Juga panjang, juga berbuah, juga berisi*

*Berisi atas kehendak Allah`*

*Sonteng* di atas merupakan *sonteng* permulaan menanam padi. Dalam *sonteng* tersebut terdapat kata *tangia*, *oyota*, dan *godhonga*. Berikut adalah proses penambahan akhiran (sufiks) pada kata tersebut.

{ <b>tangi</b> 'bangun' + <i>-a</i> }	{ <i>tangiO</i> 'bangunlah'
{ <i>oyot</i> 'akar' + <i>-a</i> }	{ <i>OyOtO</i> 'berakarliah'
{ <b>godhong</b> 'daun' + <i>-a</i> }	{ <i>gOdhOnO</i> 'berdaunlah'

## c. Aspek Leksikon

Struktur *sonteng* berikutnya adalah leksikon. Leksikon adalah komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa (Kridalaksana, 2011, hlm. 142). Leksikon disebut juga perbendaharaan kata.

Sebagian besar leksikon yang digunakan dalam *sonteng* permulaan menanam padi, memberantas hama padi, dan memetik padi adalah leksikon yang berasal dari bahasa Jawa. Namun, ada pula leksikon yang berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Arab. Contoh leksikon yang berasal dari bahasa Sanskerta adalah kata *caya* dalam petikan *sonteng* memetik padi berikut.

- (3) *Sun puluk asta kiwa dadia caya-murcaya*  
*Sun puluk asta tengen dadia inten-jumanten*  
*`Saya makan dengan tangan kiri jadilah cahaya yang terang*  
*Saya makan dengan tangan kanan jadilah intan`*

Kata *caya* adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta *caya* yang artinya sinar (Zoetmulder, 2000, hlm. 169). Mardiwarsito juga menyatakan bahwa *caya* berarti sinar atau cahaya (1990, hlm. 138). Begitu pula dengan Purwadi dan Purnomo (2008, hlm. 27), mereka menyebutkan bahwa kata *caya* tersebut berarti cahaya. Kata *caya* kemudian mengalami perulangan atau repetisi menjadi *caya-murcaya*. Sementara itu, juga terdapat leksikon yang berasal dari bahasa Arab, misalnya pada bacaan taawuz dan basmalah dalam *sonteng* memetik padi berikut.



- (4) *Angudubila himina syaitoni rajiim*  
*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Kata *ar-rahman* artinya Maha Pemurah, sedangkan kata *ar-rahiim* artinya Maha Penyayang (Munawwir, 2002, hlm. 483).

#### d. Aspek Kalimat

Aspek kalimat merupakan aspek penting yang keempat dari unsur-unsur pembangun struktur *sonteng*. Berdasarkan fungsinya dalam hubungan situasi, kalimat dibagi menjadi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat suruh (Ramlan, 2005, hlm. 26). Ramlan menjelaskan bahwa kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain, kalimat tanya adalah kalimat yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu yang pola intonasinya naik, sedangkan kalimat suruh adalah kalimat yang mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan dari orang lain. Kalimat suruh itu sendiri terdiri atas kalimat suruh yang sebenarnya, kalimat persilahan, kalimat ajakan, dan kalimat larangan.

Jenis kalimat yang paling banyak dijumpai dalam *sonteng* adalah kalimat suruh dan kalimat berita. Namun, ada pula kalimat tanya. Kalimat berita digunakan untuk menyatakan sesuatu. Kalimat suruh digunakan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Permintaan itu dapat dilihat dalam contoh kalimat berikut.

- (5) *Ibu Bumi, Bapa Kuasa*  
*Sira tangia!*  
`Ibu Bumi, Bapa Kuasa  
Kamu bangunlah!`

Kata *tangia* dibentuk dari kata dasar *tangi* dan mendapat akhiran *-a*. Verba semacam ini termasuk verba aktif imperatif yang menyatakan perintah untuk bertindak atau bersikap sesuai dengan yang disebut pada bentuk dasarnya (Wedhawati dkk, 2001, hlm. 94). Kalimat tersebut ada di dalam *sonteng* permulaan menanam padi. Pada saat memetik padi atau panen padi, dukun juga membacakan *sonteng* yang di dalamnya juga terdapat kalimat larangan yang terlihat melalui menggunakan kata *aja*, misalnya pada contoh berikut.

- (6) *Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Pemethik*  
`Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu menjadi  
Sri Pemethik`

Kalimat yang lain ada yang menggunakan kata *ora* yang menandakan kalimat negasi, misalnya dalam petikan berikut.

- (7) *Lembing ying-ying ora ana*  
*Walang sangit ora ana*  
*Walang angin ora ana*  
*Ayang-ayang ora ana*  
`Lembing ying-ying tidak ada  
Belalang sangit tidak ada  
Belalang angin tidak ada  
Ayang-ayang tidak ada`



## 2. Makna yang Terkandung dalam *Sonteng* Pertanian pada Masyarakat Dusun Kemiri, Gunungkidul, DIY

### a. *Sonteng* Permulaan Menanam Padi

Masyarakat Kemiri adalah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Mereka mengolah sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan atau ladang merupakan sawah yang mengandalkan musim hujan saja dalam pengolahannya. Apabila musim hujan telah tiba, mereka mulai sibuk mempersiapkan benih untuk mereka tanam, salah satunya adalah padi. Tradisi menanam padi pada masyarakat Kemiri disebut dengan *nyebar* karena benih padi disebar, bukan ditanam dalam bentuk bibit.

#### (8) *Ibu Bumi, Bapa Kuasa*

*Sira tangia*

*Ingsun titip wiji pari ana tegal kepanasan*

*Oyota kawat, godhonga blabag*

*Tur landhung, tur dadi, tur aos*

*Aos seka kersaning Allah*

*`Bumi dan Allah Yang Kuasa*

*Kamu bangunlah*

*Saya titip biji padi di tegal yang panas*

*Berakarliah seperti kawat, berdaunlah seperti blabag*

*juga panjang, juga berbuah, juga berisi*

*Berisi atas kehendak Allah`*

*Sonteng* (8) dibaca sebagai permulaan menanam padi. Mereka meminta izin untuk menanam padi kepada *Ibu Bumi* dan *Bapa Kuasa*. Kata *ibu* merupakan penanda bagi wanita yang telah melahirkan anak (KBBI, 1995, hlm. 364), sedangkan *bumi* merupakan penanda bagi tempat manusia hidup, disebut juga dunia atau jagat (KBBI, 1995, hlm. 154). Makna *ibu bumi* mengacu pada tanah. Apabila ditanami, tanah dapat menghasilkan bermacam-macam buah. Sementara itu, kata *bapa* merupakan penanda bagi laki-laki atau disebut juga *bapak* (KBBI, 1995, hlm. 92), sedangkan kata *kuasa* merupakan penanda bagi kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau kekuatan (KBBI, 1995, hlm. 533). *Bapa Kuasa* merupakan sebuah metafora yang mengacu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanpa izin Tuhan, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa.

Benih padi yang disebar diharapkan berakar kuat layaknya kawat dan berdaun lebar layaknya *blabag*. Kata *blabag* adalah sejenis kayu yang telah diolah menjadi lebar. Selain itu, nantinya padi tersebut diharapkan berisi.

### b. *Sonteng* Mengusir Hama Padi

Benih padi yang telah disebar akan mengalami perkembangan. Setelah benih-benih itu tumbuh, kadang-kadang mereka diserang berbagai macam hama, seperti *lembing*, *walang sangit*, *walang angin*, dan *ayang-ayang*. *Lembing* adalah sejenis hama padi yang berupa binatang kecil berwarna coklat atau hijau, kecil, dan dapat terbang. *Walang sangit* adalah sebangsa serangga yang baunya seperti barang yang sangit (KBBI, 199, hlm. 1124). *Walang angin* adalah sejenis hama padi yang tidak terlihat yang dapat mengakibatkan tanaman padi tidak berisi. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, hama yang bernama *walang angin* itu merupakan lelembut. Sementara itu, *ayang-ayang* adalah hama padi



yang berupa ulat dan berwarna hijau atau merah. Berikut adalah bacaan *sonteng* tersebut.

- (9) *Lembing ying-ying ora ana  
Walang sangit ora ana  
Walang angin ora ana  
Ayang-ayang ora ana  
Anane walang beras  
Walang beras tur aos  
Aos seka kersaning Allah  
`Lembing ying-ying tidak ada  
Belalang sangit tidak ada  
Belalang angin tidak ada  
Ayang-ayang tidak ada  
Adanya adalah belalang beras  
Belalang beras yang berisi  
Berisi atas kehendak Allah`*

*Sonteng* ini dapat dibaca oleh siapa saja. Pembacaannya ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isinya berupa permohonan agar tanaman padi terhindar dari segala macam hama.

### c. *Sonteng* Memetik atau Menuai Padi

*Sonteng* yang ketiga ini merupakan rangkaian terakhir *sonteng* dalam hal pertanian, khususnya penanaman padi. *Sonteng* ini hanya dibaca oleh seorang dukun pada saat upacara *methik pari*. Saat ini, upacara *methik pari* sudah tidak dilaksanakan lagi. Hal ini disebabkan adanya perubahan cara memetik padi. Sekitar tahun 1994, padi dipetik bagian yang ada bijinya saja. Alat yang digunakan adalah ani-ani. Ani-ani adalah pisau pemotong padi terbuat dari kayu dan bambu yang saling menyilang dengan pisau kecil yang ditancapkan pada muka kayu (KBBI, 1995, hlm. 45). Saat ini memetik padi dilakukan dengan cara memotong sampai di bagian batang paling bawah dengan menggunakan sabit.

- (10) *Ibu Bumi, Bapa Kuasa  
Aku biyen titip wiji pari ana tegal kepanasan  
Saiki wis tekan titi mangsa tua arep diklumpukke menyang pendara*

*sira*

*Sing lunga dagang layar  
Sing ndlanggung prapatan  
Padha mlumpuka sedina iki kowe disajeni pendara sira  
Apa sajene pendara sira?  
Sekul liwet, sambel gepeng, gereh pethek, endog bledukan, kopat  
lepet, kopat loar  
Nini Kethip, Kaki Kethip, balamu Si Tunggul Wulung  
Satus gelapan aja kowe sudi wuruk menyang tandur tuwuh ingsun  
Apa tandane tandur tuwuh ingsun?  
Tenjor timoa tebelat papat  
Nini Angka, Kaki Angka angakep, anglepeh, Mbok Sri Sedana  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Pemethik*



*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Pengracik  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Pengagem  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Penyeleh  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Pengayar-ayar  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Pengunduk-unduk  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Pembukak  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Penjereng  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Pemulung  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Pengunduk-unduk  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Pembukak  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Penguthut-uthut  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Penucuk  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Penyeleh  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Penumpuk  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Penutup  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Pembukak  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Pengindhrit  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Penggejlug  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Penginter-inter  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Penosoh  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Pengentas  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Penaker  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Pengekum  
Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri  
Pengetus*



*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Penutup*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Pembukak*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Penapung*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Penutup*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Pembukak*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Pengaru*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Penutup*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Pembukak*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Penapung*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Penutup*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Pembukak*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Pengebluk*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Pengebut*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Penggulug-ulug*  
*Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun lih aran nira Sri*  
*Pemuluk*  
*Sun puluk asta kiwa dadia caya-murcaya*  
*Sun puluk asta tengen dadia inten-jumanten*  
*Murup mumpyar cayane Si Jabang Bayi*  
*Mbok Sri Sedana gene ana kekurangane, aku njaluk ngapura*  
*Angudubila himina syaitoni rajiim*  
*Bismillahirrahmaanirrahiim*  
*Ana wiji pari seka Adam*  
*Adam Agung parang ndika slamet*  
*Nylameti umate Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu ngalaihi*  
*wasallam*  
*Alhamdulillah rabbi alamin*  
*`Ibu Bumi dan Tuhan Yang Kuasa*  
*Aku dulu menitip biji padi di tegal yang panas*  
*Sekarang sudah tiba waktu tua akan dikumpulkan kepada majikanmu*  
*Yang pergi berjalan untuk berdagang*  
*Yang bermain di perempatan*  
*Berkumpullah sehari ini kamu diberi sesaji oleh majikanmu*  
*Apa sesaji majikanmu?*



Nasi liwet, sambel gepeng, ikan asin, telur utuh, ketupat lepet, ketupat loar  
Nini Kethip, Kaki Kethip, pengikutmu Si Tunggul Wulung  
Seratus halilintar jangan kamu berani mencuri tumbuhnya tanamanku  
Apa tandanya tumbuhnya tanamanku?  
Tangkai muda timoa terbagi empat  
Nini Angka, Kaki Angka mendekap, membuang, Mbok Sri Sedana  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Pemethik  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Pengracik  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Pengagem  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Penyeleh  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Pengayar-ayar  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Pengunduk-unduk  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Pembukak  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Penjereng  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Pemulung  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Pengunduk-unduk  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Pembukak  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Penguthut-uthut  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Penucuk  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Penyeleh  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Penumpuk  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Penutup  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Pembukak  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Pengindhut  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Penggejlug  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri Penginter-inter



Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Penosoh  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Pengentas  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Penaker  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Pengekum  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Pengetus  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Penutup  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Pembukak  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Penapung  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Penutup  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Pembukak  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Pengarau  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Penutup  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Pembukak  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Penapung  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Penutup  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Pembukak  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Pengebluk  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Pengebut  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Penggulug-ulug  
Ibu Sri Sedana janganlah kamu terkejut saya ubah namamu Sri  
Pemuluk  
Saya makan dengan tangan kiri jadilah cahaya yang terang  
Saya makan dengan tangan kanan jadilah intan  
Menyalalah raut wajah Si Jabang Bayi  
Mbok Sri Sedana apabila ada kekurangannya, saya minta maaf  
Hamba minta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk  
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha  
Penyayang  
Ada biji padi dari Adam





Adam Agung berkata selamat  
Menyelamatkan umat Kanjeng Nabi kita Muhammad, Allah telah  
memberi rahmat kepada Muhammad serta keselamatan  
Segala puji bagi Allah`

Pembacaan *sonteng* ini ditujukan pada tanaman padi itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, tujuannya adalah untuk menghormati Dewi Sri yang dianggap sebagai Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Cerita mengenai Dewi Sri ini hidup dalam masyarakat Jawa. Cerita mengenai Dewi Sri ini juga ada dalam naskah-naskah Jawa, pakem wayang tercetak, cerita rakyat tercetak, buku-buku terbitan, dan hasil penelitian (Suyami, 200, hlm. 236—242). Peneliti mendapatkan sebuah cerita mengenai Dewi Sri yang berjudul *Serat Cariyos Dewi Sri* bernomor L/42/81/S.DL.38 (dalam Suyami, 2001, hlm. 243). Selain itu, ditemukan pula cerita tentang Dewi Sri yang berjudul “Sri Sedana” dalam buku yang berjudul *Sastra Lisan Jawa* (1979) karya Yoharni Harjono Totong Tirtawidjaya, Haryadi, Suyono, Karyadi, dan Siti Faizah.

Kedua cerita dalam sumber tersebut terdapat kemiripan. Dalam kedua sumber di atas disebutkan bahwa Malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk menurunkan biji padi dari surga. Malaikat Jibril kemudian memerintahkan Dewi Sri dan Sedana untuk membawanya ke tanah Jawa karena kekurangan bahan makanan. Padi tersebut kemudian sampailah kepada Syekh Semengke, seorang miskin yang hidup di tengah sawah. Sri dan Sedana berpesan untuk menyebarkan biji padi itu kepada anak cucu Syekh Semengke dan setiap panen padi (memetik padi) dia akan meminta sesajian (1979, hlm. 206—207).

*Sonteng* ini dimulai dengan sapaan terhadap Ibu Bumi dan Bapa Kuasa. Kemudian, dukun mengatakan bahwa dahulu, yaitu pada saat menanam padi, dirinya menitip benih padi di tegal yang panas. Kata *titip* menyatakan bahwa menanam itu sama saja dengan titip. Disebut dengan titip karena segala sesuatu itu adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Manusia tidak berdaya atas segala sesuatu itu, termasuk hasil dari menanam padi. Pada saat *sonteng* ini dibacakan, saat itu pulalah panen padi dilaksanakan. Padi “diperintah” oleh dukun untuk segera berkumpul karena akan diambil oleh majikannya untuk dibawa pulang ke rumah. Kata *diperintah* dalam konteks ini mengandung makna kias.

Sebelum dipetik, padi tersebut diberi sesaji oleh yang menanamnya. Makanan yang disajikan berupa *sekul liwet*, *sambel gepeng*, *gerek pethek*, *endog bledukan*, *kopat lepet*, dan *kopat loar*. *Sekul liwet* adalah nasi yang dibuat dengan cara diliwet atau direbus, bukan dikukus. *Sambel gepeng* adalah sambal yang dibuat dari isi kacang panjang yang telah kering, ditumbuk, diberi bumbu, dibungkus daun pisang dan dikukus. *Gerek pethek* adalah ikan asin yang bentuknya kecil-kecil seperti ibu jari manusia. *Endog bledukan* adalah telur rebus yang utuh. *Kopat lepet* adalah ketupat yang bentuknya seperti persegi panjang dengan panjang sekitar 7 cm dan lebarnya sekitar 3 cm, sedangkan *kopat loar* adalah ketupat yang bentuknya mirip dengan bujur sangkar yang sisinya berukuran 4 cm.

Menurut pandangan masyarakat Kemiri, Nini Kethip, Kaki Kethip, dan Si Tunggul Wulung adalah ratu atau raja hama padi, sedangkan padi itu sendiri disebut sebagai *Sri Sedana*. Dalam *sonteng* memetik padi ini dilafalkan sebutan-sebutan atau istilah untuk padi secara rinci berdasarkan proses memetikinya sampai berwujud nasi yang siap dimakan.



Ada kalimat yang berbunyi *Babu Sri Sedana aja sira kaget ketranggul sun liharan nira Sri Pemethik*. Makna kalimat itu adalah sebuah perintah kepada padi agar dirinya tidak terkejut karena setelah dirinya dipotong akan diubah namanya menjadi Sri Pemethik. Kata *pemethik* berasal dari kata *pethik*. Setelah dipetik dan menjadi setengah genggam tangan, diubah lagi namanya menjadi Sri Pengracik. Setelah petani mendapatkan satu genggam tangan penuh, padi diubah lagi namanya menjadi Sri Pengagem. Apabila telah mendapatkan satu genggam tangan penuh, biasanya petani akan meletakkannya terlebih dahulu. Padi yang telah diletakkan itu diubah lagi namanya menjadi Sri Penyeleh. Padi yang dipetik itu lama-kelamaan akan menjadi banyak dan akan diikat. Padi yang telah diikat tersebut kemudian diubah lagi namanya menjadi Sri Pengayar-ayar. Setiap satu ikatan kira-kira terdiri dari empat genggam orang dewasa. Satu ikat itulah yang dinamakan Sri Pengayar-ayar. Ikatan-ikatan itu akan bertambah banyak sesuai dengan hasil panen setiap orang. Kumpulan dari ikatan-ikatan itu kemudian ditumpuk untuk dijemur. Tumpukan padi itu kemudian dibuka ikatannya satu persatu. Padi yang telah dibuka ikatannya bernama Sri Pembukak. Kata *pembukak* berasal dari kata *bukak* yang berarti buka. Setelah itu padi dijemur. Padi yang dijemur itu berubah lagi namanya menjadi Sri Penjereng. Padi yang sudah mengering kemudian akan diangkat dari jemuran dan namanya berubah lagi menjadi Sri Pemulung.

Padi yang telah bernama Sri Pemulung akan dikumpulkan untuk disimpan dan diberi nama Sri Pengunduk-unduk. Sri Pengunduk-unduk akan berubah lagi menjadi Sri Pembukak manakala dibuka tutup penyimpanannya untuk dibersihkan lapisan kulit batangnya yang biasa disebut masyarakat sebagai *lamen*. Padi yang telah dibuang lamennya itu berubah lagi namanya menjadi Sri Penguthut-uthut.

Padi yang telah kering dan dibersihkan lamennya itu kemudian dibawa pulang ke rumah petani. Cara membawanya adalah dipikul dengan pikulan. Pikulan adalah alat untuk memikul beban yang dibuat dari bambu atau kayu yang dihaluskan. Ikatan-ikatan padi yang telah bersih itu akan ditusuk dengan pikulan sehingga padi berubah kembali sebutannya menjadi Sri Penucuk. Sri Penucuk yang telah sampai di rumah petani akan diletakkan di suatu tempat sehingga berubah menjadi Sri Penyeleh. Sri Penyeleh yang telah banyak akan dikumpulkan dan ditumpuk di lumbung sehingga berubah namanya menjadi Sri Penumpuk.

Ketika petani telah membutuhkan beras untuk dimasak, mereka akan mengambil padinya di lumbung. Lumbung akan dibuka dan padi akan terlihat. Pada saat itu padi berubah namanya menjadi Sri Pembukak. Padi kemudian diambil dan dimasukkan ke suatu wadah yang terbuat dari bambu yang bernama *tenggok*. Padi itu kemudian dibawa ke lesung dengan cara dibawa dengan diletakkan di pinggul atau *diindhut* sehingga padi itu bernama Sri Pengindhut. Lesung adalah lumpang kayu panjang untuk menumbuk padi (KBBI, 1995, hlm. 588). Setelah dimasukkan ke dalam lubang dalam lesung sebagai tempat untuk menumbuk padi atau disebut lumpang, padi mulai ditumbuk untuk dilepaskan kulitnya. Mereka menumbuk padi dengan alu. Alu adalah alat untuk menumbuk padi yang dibuat dari kayu (KBBI, 1995, hlm. 28). Pada saat itulah padi berubah lagi namanya menjadi Sri Penggejlug. Disebut *penggejlug* karena padi ditumbuk atau *digejlug*. Sri Penggejlug kemudian diletakkan dalam nyiru untuk memisahkan padi yang telah bersih dari kulit (beras) dengan padi yang masih utuh dengan kulitnya. Padi ini kemudian berubah lagi namanya menjadi Sri Penginter-



inter. Dinamakan *penginter-inter* karena cara memisahkannya disebut dengan *diinteri* `diputar-putar`. Setelah semuanya selesai *diinteri*, padi itu sudah berubah wujud menjadi beras. Beras tersebut kemudian disebut sebagai Sri Penosoh. Beras itu kemudian diambil, dibawa pulang, dan ditakar dengan alat penakar yang disebut *beruk*. *Beruk* adalah alat penakar beras yang berasal dari tempurung kelapa yang salah satu bagiannya dilubangi. Beras pada saat ditakar itulah yang kemudian disebut sebagai Sri Penaker.

Setiap akan memasak beras, beras tersebut harus dicuci terlebih dahulu. Pada saat dicuci itulah beras berubah namanya menjadi Sri Pengekum. Disebut dengan *pengekum* karena beras itu direndam air. Setelah itu, beras ditiriskan sehingga namanya menjadi Sri Pengetus. Beras dimasak dengan cara dikukus menggunakan dandang dan disebutlah Sri Penapung. Pada saat dimasak tentulah harus ditutup agar lebih cepat masak. Pada saat ditutup itulah beras berubah kembali namanya menjadi Sri Penutup. Apabila beras telah setengah matang, tutup akan dibuka dan disebutlah Sri Pembukak. Beras diaduk dengan alat yang bernama *karu* sehingga disebut Sri Pengaru. *Karu* merupakan alat pengaduk yang berasal dari kayu. Setelah diaduk, ditutup lagi dan dibuka lagi sehingga namanya berubah menjadi Sri Penutup kemudian Sri Pembukak. Proses memasak berlanjut sampai melewati beberapa tahapan hingga matang dan diangkat dari dandang untuk diletakkan di atas *iyon*. *Iyon* adalah wadah nasi yang berupa anyaman bambu yang berbentuk persegi dengan panjang sisinya sekitar 1 meter. Pada saat diletakkan di wadah ini, nasi dinamai dengan Sri Pengebluk. Sebelum dimakan, nasi lebih baik dikipasi terlebih dahulu sehingga namanya menjadi Sri Pengebut. Sri Pengebut itu kemudian diambil untuk dimakan sehingga disebut Sri Pengulug-ulug. Tahapan terakhir adalah nasi siap untuk dimakan. Nama paling akhir untuk nasi ini adalah Sri Pemuluk.

Nasi yang dimakan tersebut diharapkan dapat memberikan berkah. Berkah yang diharapkan itu digambarkan dengan *caya-murcaya* dan *inten-jumanten*. Telah disebutkan sebelumnya bahwa kata *caya* berarti sinar (Zoetmulder, 2000, hlm. 169). Makna *caya-murcaya* adalah bersinar terang. Sementara itu, kata *inten* sama dengan *intan*, yaitu batu permata yang berkilauan (KBBI, 1995, hlm. 382). Setelah makan nasi tersebut, wajah diharapkan dapat bercahaya kembali atau bertenaga kembali dan dapat memberikan manfaat bagi tubuh. *Sonteng* ini diakhiri dengan kalimat *Alhamdulillahil rabbil alamin*, yang artinya segala puji bagi Allah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kemiri mengucapkan syukur terhadap pemberian Allah Yang Mahakuasa.

## PENUTUP

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk *sonteng* dibangun oleh aspek fonologi, morfologi, leksikon, dan kalimat. Aspek fonologi menunjukkan bahwa dalam *sonteng* terdapat kombinasi bunyi-bunyi yang indah atau efon. Bunyi-bunyi di dalam *sonteng* dibentuk sedemikian rupa sehingga menciptakan efek keindahan. Perulangan atau repetisi juga terlihat dalam *sonteng*. Baik keindahan bunyi maupun perulangan kata bertujuan supaya *sonteng* mudah dihafalkan. Sementara itu, dalam aspek morfologi, terdapat bentuk-bentuk verba yang menyatakan perintah. Setiap *sonteng* mengandung permohonan kepada Tuhan. Permohonan tersebut diwujudkan dalam kalimat suruh sehingga di dalam *sonteng* sering dijumpai imbuhan yang menyatakan perintah, misalnya sufiks *-a*.



Dalam aspek kalimat, terlihat bahwa *sonteng* dibangun oleh jenis kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat suruh/perintah. Selain itu, terdapat pula bentuk kalimat negasi. Kalimat-kalimat yang membangun tersebut sebagian besar leksikonya berasal dari bahasa Jawa dengan percampuran leksikon yang berasal dari bahasa Arab dan Sanskerta.

Penelitian terhadap tiga *sonteng* ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Kemiri terhadap Tuhan Yang Maha Esa mendapat pengaruh dari tradisi Hindu. Penyebutan Dewi Sri identik dengan salah satu dewi yang diyakini dalam agama Hindu. Ada salah satu sumber cerita mengenai Dewi Sri yang menyebutkan bahwa Dewi Sri adalah istri dari Dewa Wisnu. Namun, kedudukan Dewi Sri dalam pandangan hidup orang Jawa memiliki kelebihan tersendiri, yaitu lebih dekat dengan kehidupan manusia (Sunyoto, 1995, hlm. 27). Tradisi Hindu juga terlihat dengan adanya pemberian sesaji. Selain itu, dalam *sonteng* juga terdapat kalimat *Bismillahirrahmaanirrahiim*, *Angudubillahi minasyaitoni rajiiim*, dan *Alhamdulillah rabbil alamin* yang menunjukkan adanya pengaruh Islam.

Kajian terhadap makna menunjukkan pandangan masyarakat Kemiri terhadap dunia, leluhur, Tuhan, dan keseimbangan alam semesta. Mereka meyakini bahwa segala usaha sangat bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, mereka juga tetap menghormati leluhurnya sebagai bentuk menjaga keseimbangan alam semesta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Bambang Yudi. (1995). *Kristal-Kristal Ilmu Bahasa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Keesing, Roger M dan Samuel Gunawan. (1989). *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.
- Kridalaksana, Harimurti. (2011). *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mardiwarsito, L. (1990). *Kamus Jawa Kuna (Kawi)-Indonesia*. Flores: Nusa Indah.
- Munawwir, A.W. (2002). *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Edisi Kedua. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Pateda, Mansoer. (1990). *Aspek-Aspek Psikolinguistik*. Flores: Nusa Indah.
- Purwadi dan Eko Priyo Purnomo. (2008). *Kamus Sansekerta Indonesia*. Yogyakarta: Budaya Jawa.com
- Pradopo, Rachmat Djoko. (2005). *Teori Pengkajian Puisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ramlan. (2005). *Ilmu Bahasa Indonesia: Sintaksis*. Yogyakarta: C.V. Karyono.
- Saussure, Ferdinand de. (1966). *Course in General Linguistics*. New York: McGraw-Hill Paperback.
- Steinberg, Danny D, at all. (2001). *Psycholinguistics: Language, Mind and World*. London: Longman.
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sunyoto. (1995). *Pasren: dalam Kehidupan Masyarakat Tradisional Jawa*. Yogyakarta: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman DIY, Direktorat Jendral Kebudayaan Depdikbud.
- Suyono, Ariyono. (1985). *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.



- Suyami. (2001). *Serat Cariyos Dewi Sri dalam Perbandingan*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Tim Penyusun Kamus. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tirtawidjaya, Yoharni Harjono Totong, dkk. (1979). *Sastra Lisan Jawa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Wedhawati, dkk. (2001). *Tata Bahasa Jawa Mutakhir*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Zoetmulder, P.J. dan S.O. Robson. (2000). *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Itaristanti  
Judul Makalah : “Kajian Bentuk dan Makna *Sonteng* Pertanian pada Masyarakat Dusun Kemiri, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 08.00—09.30  
Moderator : Dr. Tengku Syarfina, M.Hum.  
Pencatat : 1. Triwulandari  
2. Winci Firdaus

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Dalam budaya pertanian di Dusun Kemiri terdapat satu tradisi menuai padi yang dipimpin oleh seorang dukun. Dukun itu melafalkan mantra. Mantra dalam masyarakat Dusun Kemiri disebut dengan *sonteng*.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna *sonteng* pertanian pada masyarakat Dusun Kemiri.
3. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Semiotika (Kridalaksana, 2011, hlm. 219). Saussure (1966, hlm. 66) menyatakan bahwa bahasa merupakan sistem tanda. Tanda terdiri atas dua hal penting, yaitu konsep (*concept*) dan citra bunyi (*sound image*). Bentuk bahasa dalam *sonteng* (mantra) juga merupakan sistem tanda. Tanda-tanda itu memungkinkan manusia untuk berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta.
4. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis data dengan metode padan translasional.
5. *Sonteng* yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan aktivitas dalam bidang pertanian, yaitu *sonteng* permulaan menanam padi, *sonteng* untuk mengusir hama padi, dan *sonteng methik pari* `menuai padi`.
6. Bentuk *sonteng* pertanian pada masyarakat Dusun Kemiri dibagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut.
  - a. Aspek fonologis: bunyi eufoni, ritme, dan repetisi
  - b. Aspek morfologis: sufiks *-a*
  - c. Aspek leksikon: leksikon yang berasal dari bahasa Arab
  - d. Aspek kalimat: kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat negasi
7. Makna yang terkandung dalam *sonteng* pertanian pada masyarakat Dusun Kemiri dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.
  - a. *Sonteng* Permulaan Menanam Padi
  - b. *Sonteng* Mengusir Hama Padi
  - c. *Sonteng* Memetik atau Menuai Padi
8. Dari pembahasan makalah ini dapat disimpulkan bahwa bentuk *sonteng* dibangun oleh aspek fonologi, morfologi, leksikon, dan kalimat. Aspek fonologi menunjukkan bahwa dalam *sonteng* terdapat kombinasi bunyi-bunyi



yang indah atau eufonis. Bunyi-bunyi di dalam *sonteng* dibentuk sedemikian rupa sehingga menciptakan efek keindahan. Perulangan atau repetisi juga terlihat dalam *sonteng*. Baik keindahan bunyi maupun perulangan kata bertujuan supaya *sonteng* mudah dihafalkan. Sementara itu, dalam aspek morfologi, terdapat bentuk-bentuk verba yang menyatakan perintah. Setiap *sonteng* mengandung permohonan kepada Tuhan. Permohonan tersebut diwujudkan dalam kalimat suruhan sehingga di dalam *sonteng* sering ditemukan imbuhan yang menyatakan perintah, misalnya sufiks *-a*. Dalam aspek kalimat, terlihat bahwa *sonteng* dibangun oleh jenis kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat suruhan/perintah. Selain itu, terdapat pula bentuk kalimat negasi. Sebagian besar leksikon dalam kalimat-kalimat tersebut berasal dari bahasa Jawa yang mengalami percampuran dengan leksikon yang berasal dari bahasa Arab dan Sanskerta.

9. Penelitian terhadap tiga *sonteng* itu menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Kemiri terhadap Tuhan Yang Maha Esa mendapat pengaruh dari tradisi Hindu. Penyebutan Dewi Sri identik dengan salah satu dewi yang diyakini dalam agama Hindu. Ada salah satu sumber cerita yang menyebutkan bahwa Dewi Sri adalah istri Dewa Wisnu. Namun, kedudukan Dewi Sri dalam pandangan hidup orang Jawa memiliki kelebihan tersendiri, yaitu lebih dekat dengan kehidupan manusia (Sunyoto, 1995, hlm. 27). Tradisi Hindu juga terlihat dengan adanya pemberian sesaji. Selain itu, dalam *sonteng* juga terdapat kalimat *bismillahirrahmaanirrahiim*, *audzubillahi minasyaitoni rajim*, dan *alhamdulillah rabbil alamin* yang menunjukkan adanya pengaruh Islam.
10. Kajian terhadap makna menunjukkan pandangan masyarakat Kemiri terhadap dunia, leluhur, Tuhan, dan keseimbangan alam semesta. Mereka meyakini bahwa segala usaha sangat bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, mereka juga tetap menghormati leluhurnya sebagai bentuk menjaga keseimbangan alam semesta.

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Sutrisno Wibowo

Instansi : UNY

#### **Pertanyaan:**

Budayan tidak akan mungkin hilang, tetapi mungkin bergeser. Bagaimana pandangan peneliti terkait hal tersebut?

#### **Jawaban:**

Di Dusun Kemiri wiwitan adalah permulaan penanaman padi. Yang dapat diajarkan kepada masyarakat umum adalah *sonteng* yang kedua dan ketiga, sedangkan *sonteng* yang pertama hanya bisa dilakukan oleh dukun saja.

#### **Penanya 2**

Nama : Rifari

Instansi : Univeristas Negeri Malang



**Pertanyaan:**

Tradisi *sonteng* tidak dilakukan oleh dukun, tetapi dapat dilakukan oleh semua masyarakat. Ibu mengatakan *sonteng* sudah punah, tetapi di beberapa daerah justru masih ada. Bagaimana pandangan Ibu mengenai hal itu? Upaya apa yang harus dilakukan?

**Jawaban:**

Yang tidak dilakukan adalah hanya yang terkait dengan *methik padi*, sedangkan dua mantra lainnya masih dilakukan oleh banyak orang di dusun itu. Upaya saya dalam penelitian ini sudah merupakan usaha pelestarian berupa dokumentasi *sonteng*.

**Isu-Isu Penting:**

1. Syair *sonteng* yang hampir punah di daerah perlu direvitalisasi atau didokumentasikan oleh Badan Bahasa.
2. Perlu diadakan sosialisasi agar masyarakat dapat mempertahankan tradisi *sonteng*.





## 7. *Cablaka*: Penghela Kejujuran dalam Cerita Rakyat Banyumasan dan Urgensinya sebagai Muatan Pendidikan

### **CABLAKA: PENGHELA KEJUJURAN DALAM CERITA RAKYAT BANYUMASAN DAN URGENSINYA SEBAGAI MUATAN PENDIDIKAN**

**Meina Febriani**

Universitas Negeri Semarang  
meinafebri@mail.unnes.ac.id

#### **Abstrak**

*Cablaka* menjadi identitas subkebudayaan Jawa-Banyumasan yang *blak-blakan* atau apa adanya sehingga dapat dijadikan sebagai penghela kejujuran. Tujuan penulisan makalah ini adalah (1) menggali nilai kultural *cablaka* dalam cerita rakyat Banyumasan, (2) potensi *cablaka* sebagai penghela kejujuran, dan (3) urgensinya sebagai muatan pendidikan. Data dalam tulisan ini diperoleh melalui studi literatur ilmiah dan dokumen cerita rakyat, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Kajian dalam makalah ini berhasil mengungkapkan tiga substansi sebagai berikut. Pertama, *cablaka* dalam cerita rakyat Banyumasan merefleksikan pengetahuan, nilai, dan keyakinan. Bahasa *ngapak* Banyumas menunjukkan *cablaka*: egaliter, terus terang, jujur, dan tegas. Kedua, potensi *cablaka* (kejujuran bertutur) direfleksikan melalui (1) cara berpikir, (2) bersikap, dan (3) berperilaku. Dibutuhkan strategi yang tepat dalam mengadopsi *cablaka* dalam konteks pendidikan informal maupun formal, baik melalui strategi enkulturasi maupun pendidikan formal dengan memperhatikan (1) peran guru, (2) sumber belajar, (3) media, dan (4) strategi bercerita.

**Kata-kata kunci:** Banyumasan, *cablaka*, cerita rakyat, kejujuran

#### **Abstract**

*Cablaka* is the identity of Banyumas-Javanese subculture in which is *blak-blakan* or outspoken. Therefore, it becomes the proponent of certain characters, which is honesty. This research is objected to: (1) discover the cultural value of *cablaka* in Banyumas folklores, (2) the potentials of *cablaka* as the proponent of honest character, and (3) the urgencies of it as the material of education. The data of this research came from literature and folklore documents review which were analysed using analytical descriptive technique. The discussion of this research shows the existence of three substances. *First*, *Cablaka* of Banyumas folklores reflects knowledge, values, and beliefs Banyumas *ngapak* dialect defines *cablaka* as egalitarian, truthful, honest, and firm. *Second*, *cablaka* (honest speaking) is depicted as (1) mindset, (2) behavior, and (3) manner. It requires strategic method to adopt *cablaka* in the context of informal or formal education whether through enculturation or formal teaching, such as: (1) teachers' role, (2) learning sources, (3) media, and (4) storytelling strategy.

**Keywords:** Banyumasan, *cablaka*, folklore, honesty



## PENDAHULUAN

Cerita rakyat pada umumnya adalah bagian dari sastra rakyat, yang lebih banyak disebut sebagai cerita rakyat. Sederhananya, cerita rakyat adalah kisah tradisional yang telah diwariskan dari mulut ke mulut sebelum sistem penulisan dikembangkan. Cerita rakyat biasanya termasuk bahasa dan linguistik yang memiliki kekhasan fitur struktural, seperti kata-kata baru, *fonomatopoetik*, dan berulang atau paralel pola fonologis atau tata bahasa yang menciptakan ritme yang menarik (lihat Lwin, 2015).

Cerita rakyat sebagai karya sastra lokal telah menjadi penghela karakter masyarakat di nusantara sejak lama. *Cablaka* sebagai karakter dalam cerita rakyat Banyumasan adalah segelintir dari ribuah kearifan budaya di nusantara. Isinya sangat mendalam dan mampu menunjukkan refleksi pengetahuan, nilai, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Banyumas sebagai suatu subkebudayaan Jawa (Sugiarto, 2017). Dengan demikian, cerita rakyat merupakan produk kultural yang berada dalam posisi lokalitas, sifatnya unik dan kedaerahan.

Seperti yang diungkapkan Priyadi (2007), *cablaka* merupakan spontanitas menanggapi fenomena tanpa ditutup-tutupi. Secara etimologis, menurut Mardiarsito (1979, hlm. 106), kata *blaka* berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni *balaka* dan juga bahasa Sanskerta *walaka* yang bermakna terus terang, jujur, lurus, tanpa ditutup-tutupi. Kata *suta* berarti anak sehingga istilah *blaka suta* mengandung makna berbicara secara terus terang, seperti anak yang masih murni, lugu, dan apa adanya. *Cablaka* merupakan bahasa yang terkesan blak-blakan dan lugas (*semblothongan*). *Cablaka* sebagai sebuah identitas kultural juga muncul sebagai gambaran kompleksitas karakter yang terefleksi pada pandangan hidup, tingkah laku, sikap, bahkan gaya hidup.

Identitas *cablaka* yang dijadikan falsafah hidup masyarakat Banyumas terepresentasi dalam berbagai nilai yang terkandung dalam unsur kebudayaan Banyumas. Hal yang cukup *kentara* pada pilihan tokoh Bawor (Bagong) sebagai simbol Banyumas. Bawor adalah tokoh pewayangan biasa yang tidak memiliki kekuasaan apa pun. Satu-satunya kelebihan Bawor adalah karakternya yang selalu berkata apa adanya. Pilihan masyarakat Banyumas pada sosok Bawor yang *cablaka* juga tergambar pada cerita-cerita rakyat yang beredar di lingkungan Banyumas. Cerita rakyat Banyumasan merupakan tradisi lisan yang merekam kehidupan masyarakat dalam bentuk rekaan.

Cerita rakyat sebagai sebuah cerita memiliki alur, konflik, tokoh, penokohan, dan nilai. Ketika budaya tutur masih populer, cerita rakyat bisa menjadi sarana yang efektif untuk pendidikan masyarakat. Ditinjau dari sudut pandang psikologis, masyarakat lebih tertarik belajar dari cerita rakyat daripada diajari secara lugas. Seperti dikatakan Lukens (2003), sastra menawarkan dua hal utama, yakni pemahaman dan kesenangan. Cerita rakyat sebagai salah satu karya sastra hadir kepada masyarakat sebagai hiburan yang menyenangkan. Gambaran kehidupan yang ada pada cerita rakyat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang persoalan hidup dan kehidupan (Putnam, 1964; Lwin, 2015).

Tegasnya, cerita rakyat Banyumasan, dengan kandungan *cablaka* sebagaimana disampaikan di atas, adalah bagian dari kearifan bahasa yang menjadi bagian penting dalam pendidikan. Cerita rakyat Banyumasan memiliki unsur-unsur tradisional mengenai cara hidup sekelompok orang dan ekspresi kreatif yang berkembang secara alami sebagai bagian dari cara hidup tersebut.



Dalam konteks pendidikan berbasis kebudayaan, apresiasi atau penikmatan terhadap cerita rakyat Banyumasan dengan kandungan *cablaka*-nya tentu memberikan kesempatan bagi pemahaman pesan atau isi dengan karakter di dalamnya. Sugiarto (2013) mengungkapkan, jika muatan karakter dimasukkan dalam pendidikan, tidak hanya berurusan pada tataran kognitif (*knowledge*) dan keterampilan (*skills*), tetapi justru lebih jauh berurusan dengan tataran sikap (*attitude*). Sikap dalam pengertian ini adalah semangat, tabiat, watak, kejujuran, kerja keras, kesungguhan, dan sebagainya. Sikap atau *attitude* adalah ranah kepribadian yang di dalamnya juga berurusan dan berhubungan erat dengan karakter. Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa karakter terefleksikan dalam penampilan kepribadian seseorang secara menyeluruh. Artinya, karakter dapat dideteksi dari tindakan sebagai bentuk perilaku yang merefleksikan pengetahuan, kemahiran, dan sikap ketika berinteraksi dalam suatu peristiwa tertentu. Dalam hal ini, sikap menjadi landasan utama bagi munculnya karakter yang unggul.

Putnam (1964) menyatakan bahwa cerita rakyat merupakan kunci untuk pemahaman budaya. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa mengangkat cerita rakyat sebagai muatan pendidikan merupakan sarana yang paling tepat untuk enkulturasi pada abad ke-21. Di satu segi, saat kehidupan modern generasi Y dan Z di Indonesia amat akrab dengan pesan-pesan digital, budaya tutur pun tergeser oleh budaya baca. Sayangnya, budaya baca yang belum sempurna kini disusul oleh munculnya budaya visual. Sementara di segi lain, kita menyaksikan subkebudayaan Banyumasan masih cukup lekat dengan cerita rakyat dalam kehidupannya sebagai sebuah identitas atau karakteristik berbahasa.

Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman, pencerita rakyat tak boleh kehilangan akal, mengikuti tuntutan zaman tanpa mengorbankan muatan karakter. Berdasarkan itu, tulisan ini ingin memfokuskan pada reorientasi terhadap kearifan cerita rakyat Banyumasan sebagaimana disebutkan di atas yang menjadi peluang untuk mengajarkan nilai-nilai *cablaka* sebagai produk nilai kearifan lokal melalui kegiatan apresiasi cerita rakyat Banyumasan kepada masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Cerita Rakyat sebagai Karya Sastra (Produk Budaya) Lokal**

Kebudayaan merupakan konsep yang kompleks sehingga tidak bisa dipahami secara parsial. Kebudayaan menurut Koentjaraningrat (2004, hlm. 72) adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan terbentuk oleh kelompok manusia dengan kesamaan serta kedekatan kultural. Itulah sebabnya hubungan antara budaya dan manusia tidak mungkin terpisahkan. Kebudayaan menjadi sesuatu yang dapat memengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat karena bersifat pedoman bagi penganutnya.

Kebudayaan memiliki tujuh komponen atau unsur, yaitu: (1) sistem religi, (2) sistem mata pencaharian, (3) sistem organisasi sosial, (4) sistem pengetahuan, (5) peralatan hidup dan teknologi, (6) kesenian, dan (7) sistem komunikasi atau bahasa (lihat Koentjaraningrat, 2004). Cerita rakyat sebagai jenis karya sastra merupakan bagian dari sistem komunikasi/bahasa sekaligus kesenian. Unsur pembentuk cerita rakyat adalah bahasa, sedangkan cara dan corak penuturannya adalah seni.



Kebudayaan juga memiliki tiga dimensi atau wujud (lihat Koentjaraningrat (2004, hlm. 72). Pertama, kebudayaan sebagai suatu yang kompleks dari ide, gagasan, nilai-nilai, dan norma. Wujud kebudayaan ini bersifat abstrak karena berwujud konsep yang bersifat abstrak, termasuk tata cara atau bagaimana orang berbicara. Kedua, kebudayaan sebagai suatu yang kompleks dalam aktivitas atau tindakan berpola dari individu dalam masyarakat. Inilah yang disebut sistem sosial, yang terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi dalam batas dan ruang sosial tertentu sehingga membentuk suatu tindakan bersistem. Ketiga, kebudayaan yang berwujud produk. Dimensi kebudayaan ini termasuk benda-benda hasil karya manusia, kesenian, karya sastra, dan sebagainya.

Cerita rakyat juga memiliki lingkup ketiga dimensi tersebut. Sebagai sebuah karya sastra (lisan), di satu segi cerita rakyat merupakan sebuah produk budaya sehingga menempati dimensi kebendaan. Di segi lain, cerita rakyat memiliki kandungan nilai-nilai dan konsep hidup masyarakat Banyumas, bahkan menjadi pedoman dan sekaligus refleksi sikap dan perilaku masyarakat pendukungnya.

Cerita rakyat termasuk warisan nusantara dari semua kelompok yang berhubungan dengannya. Cerita rakyat mampu memosisikan sekelompok masyarakat penganutnya sehingga memiliki ikatan psikologis satu sama lain. Oleh sebab itu, tidak jarang cerita rakyat sampai saat ini masih cukup efektif dipakai oleh keluarga dan masyarakat untuk mempromosikan pemahaman, penerimaan, dan penghargaan terhadap warisan budayanya.

Cerita rakyat sebagai salah satu jenis cerita anak tradisional merupakan cerita yang tumbuh dari lapisan rakyat sejak zaman dahulu (Sarumpaet, 1976). Cerita rakyat sebagai produk budaya lokal memang tak terlepas dari statusnya yang bermula dari tradisi lisan. Pada zaman dulu cerita rakyat dianggap begitu sakral, bahkan hanya orang yang disebut pawanglah yang boleh mengisahkan cerita rakyat pada orang-orang. Anak-anak duduk berkerumun menanti cerita dari pawang.

Cerita rakyat sebagai salah satu wujud dari folklor pun ditegaskan oleh Bascom (dalam Endraswara, 2013), bahwa semua folklor diwariskan secara lisan. Kelisanan ini yang menyebabkan cerita rakyat lebih bervariasi. Muatan cerita rakyat sering beraneka ragam, di antaranya berisi pendidikan karakter lokalitas khas budaya setempat. Pendidikan karakter khas budaya lokal dalam wawasan antropologi psikologi berkaitan dengan kepribadian masyarakat yang sebermula dari falsafah hidup yang dianggap luhur.

Cerita rakyat Banyumas sebagai produk khas budaya lokal merupakan sarana pembelajaran moral tersirat, seperti yang disampaikan di dalam pantun maupun lagu tradisional. Pembelajaran moral yang tersirat ini merupakan metode efektif, khususnya dalam mendidik anak-anak lewat penceritaan cerita rakyat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Priyono (2006) bahwa kegiatan menuturkan cerita rakyat sebenarnya tidak sekadar bersifat hiburan belaka. Cerita rakyat memiliki tujuan yang lebih luhur, yakni pengenalan alam lingkungan, budi pekerti, dan mendorong anak berperilaku positif. Anak-anak dapat belajar memahami cerita rakyat sebelum mereka mampu berpikir logis, sebelum dapat menulis dan membaca. Menuturkan cerita rakyat merupakan kegiatan penting sebagai jembatan sampai anak dapat memahami cerita dan berpikir logis.

Cerita rakyat yang dahulu merupakan tradisi lisan dan menyebar dari mulut ke mulut saat ini hampir mengalami pergeseran seiring dengan berkembangnya



teknologi. Cerita rakyat tak lagi hanya dikisahkan oleh pawang, juga tak hanya menjadi tradisi lisan. Saat ini cerita rakyat juga berkembang melalui tradisi tulis. Begitu juga cara penceritaannya, tidak hanya disajikan dalam bentuk pertunjukan; cerita rakyat dalam bentuk tulis bisa dinikmati dengan cara dibaca.

Indonesia mempunyai kekayaan tradisi berupa budaya tulis (kitab, nota perjanjian, dan stempel) serta budaya tutur (pantun, puisi tradisional, dan cerita rakyat). Penikmat budaya tulis dan tutur secara umum dapat dibedakan dari segi umur, gender, tingkat lapisan masyarakat, dan suku bangsanya. Budaya tutur merupakan budaya yang bersifat nirliteratur dan budaya tulis bersifat literatur. Oleh karena itu, keduanya mempunyai keunikan dan kelebihan sendiri. Cerita rakyat merupakan salah satu jenis kebudayaan tutur yang disampaikan dari lisan ke lisan secara turun-temurun. Pada perkembangannya, cerita rakyat yang merupakan budaya lisan juga ditulis untuk dibaca atau bahkan dilisankan kembali.

Menurut Bascom (dalam Danandjaja, 2002), cerita rakyat adalah kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan suatu kebudayaan yang disebarkan dan turun-temurun secara lisan atau mulut ke mulut. Berkaitan dengan hal tersebut, cerita rakyat pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu mite, legenda, dan cerita rakyat. Hampir sama dengan Bascom, Nurgiyantoro (2005) berpendapat bahwa cerita rakyat merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering disebut tidak masuk akal. Cerita rakyat juga disebut sebagai cerita fantasi karena terkesan aneh dan tidak dapat diterima oleh logika. Cerita rakyat yang disebut sebagai salah satu genre cerita anak memiliki nilai fiktif, baik dari sudut latar, alur, maupun penokohan.

Nurgiyantoro (2005) mengklasifikasikan cerita rakyat menurut waktu kemunculannya, yakni cerita rakyat klasik dan cerita rakyat modern. Pembedaan ini juga sesuai dengan pendapat Stewig (dalam Nurgiyantoro, 2005), cerita rakyat klasik termasuk sastra tradisional, sedangkan cerita rakyat modern termasuk sastra rekaan. Cerita rakyat klasik adalah cerita rakyat yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tersebar secara turun-temurun serta tidak jelas siapa pengarangnya dan kapan cerita rakyat itu dibuat. Berbeda dengan cerita rakyat klasik, cerita rakyat modern merupakan cerita rakyat yang sengaja dikarang oleh seseorang dengan maksud agar dibaca orang lain.

Seperti halnya ungkapan yang lazim didengar di masyarakat, guru terbaik adalah teladan, cerita rakyat berfungsi sebagai alat pengesahan pranata sosial dan lembaga kebudayaan (Danandjaja, 2002). Isi cerita rakyat membenarkan dan memperkuat suatu tindakan atau perilaku kolektif tertentu. Fungsi tersebut hanya terdapat dalam jenis cerita rakyat, mite, dan legenda. Fungsi lain cerita rakyat adalah alat pendidikan anak (pedagogi). Isi ceritanya mengandung ajaran moral, filsafat, dan agama. Fungsi pendidikan terdapat pada jenis cerita rakyat fabel karena ditujukan kepada anak untuk berbuat baik dan dapat menggunakan akal sehatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, cerita rakyat dapat menjadi penghibur hati yang lara. Fungsi ini terdapat pada cerita rakyat yang isinya menceritakan tentang lelucon atau kebodohan seseorang yang menimbulkan kegembiraan.

## 2. *Cablaka* dalam Cerita Rakyat Banyumasan

Masyarakat di wilayah Banyumas dalam konteks kebudayaan berada dalam wilayah subkebudayaan Jawa-Banyumasan. Wilayah kebudayaan bukan berarti wilayah politik-geografis dalam daerah kekuasaan pemerintahan, tetapi wilayah dengan latar ekologi yang memiliki sifat kultural yang sama. Dalam istilah kultural, masyarakat Banyumas sering disebut “wong Banyumas” sebagaimana entitas sosial yang lain, seperti *wong* Sala, *wong* Yogya, *wong* Semarang, atau *wong* Surabaya. Perbedaan ini lebih banyak disebabkan, selain oleh wilayah geografisnya, juga terletak pada dan disebabkan oleh logat bahasa Jawa yang digunakan dalam bertutur. Sebagai rumpun logat yang disebut *ngapak*, *wong* Banyumas juga memiliki kekhasan bahasa sendiri, yaitu Ngapak-Banyumas.

Berikut ini adalah posisi subkebudayaan Banyumasan dalam peta kebudayaan yang berbatasan langsung dengan subkebudayaan Sunda, Pesisir *Kulon*, dan *Bagelen*.



(Sumber gambar: Sugiarto, 2017)

Istilah *cablaka* dalam ranah budaya Banyumas sudah lahir sejak masa penjajahan Belanda. Masyarakat Banyumas yang mempunyai dialek bahasa *ngapak-ngapak* ternyata mengandung makna mendalam, yakni mencerminkan karakter masyarakat Banyumas yang *cablaka*: egaliter, terus terang, jujur, dan tegas. Begitu juga dengan cerita rakyat yang tersebar pada masyarakat Banyumas, cerita rakyat pun menjadi media pendokumentasian *cablaka* sebagai sistem nilai kebudayaan Banyumas.

Masyarakat Banyumas mendokumentasikan pemikirannya dalam bentuk monumen. Cerita rakyat sebagai produk lokalitas menjadi salah satu alat yang efektif untuk merepresentasikan ke-*cablaka*-an masyarakat Banyumas yang tanpa *tedeng aling-aling*. Nilai itu ditransformasikan pada tokoh dalam teks cerita rakyat yang beredar di lingkungan Banyumasan.

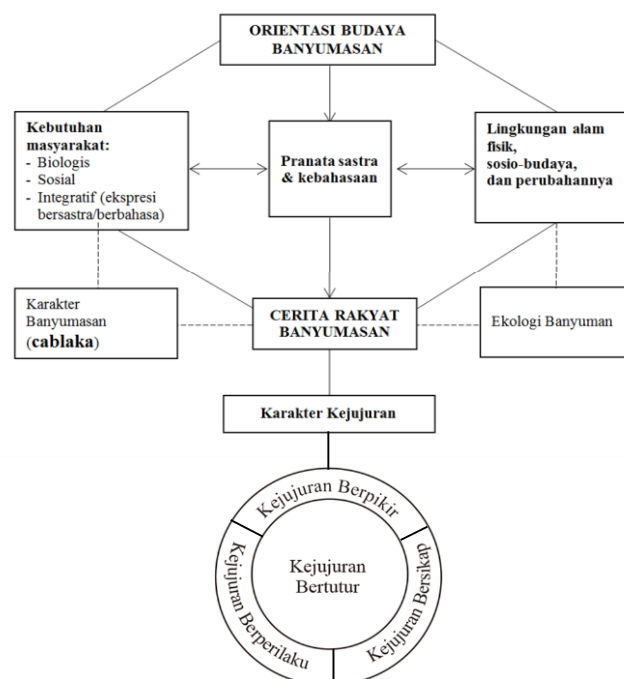
Selain ikon Punakawan Bawor sebagai perwujudan watak *cablaka*, terdapat perwujudan lain dalam tokoh-tokoh cerita yang beredar di Banyumas. Perwujudan tersebut mengungkapkan perasaan dan suara hatinya dengan tidak berkata *ya*, sedangkan di belakang *tidak*. Contoh lain, Priyadi (2007) pun menjelaskan karakter *cablaka* dalam pewayangan Jawa dan juga *gagrag* Banyumasan yang tampak pada tokoh Werkudara (Bima), Antasena, Lingsanggeni, serta Prabu Puntadewa yang dikenal sebagai manusia yang berdarah putih. Dalam adegan *gara-gara*, bahkan pada adegan-adegan lain juga, ditunjukkan oleh dalang perilaku *penjorangan* yang intinya lebih mengarah pada *glewehan*. Tokoh-tokoh punakawan dan Antasena oleh dalang sering dipakai untuk menunjukkan perilaku *penjorangan*, tetapi tokoh Puntadewa, Werkudara, dan Lingsanggeni dikategorikan *thokmelong* atau *cablaka* yang serius, meskipun ada juga sebuah naskah wayang dari Purbalingga dari tahun 1860 yang berisi teks yang

menggunakan dewa sebagai media *glewehan*, misalnya Sanghyang Narada melakukan *keprok bokong* untuk *glewehi* (menggoda, mengganggu, bahkan ada unsur pelecehan) terhadap tapa Begawan Palasara yang bisa dibatalkan (Roorda, dalam Priyadi 2007). Wayang *gagrag* Banyumasan selama ini menjadi media yang digunakan untuk menyatakan *kecablakaan* atau *keblakasutaan* atau *kethokmelongan* masyarakat Banyumas di antara sesama Banyumasan.

Cerita rakyat Banyumasan sebagai teks kebudayaan merupakan rekam jejak kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Cerita rakyat dianggap sebagai sistem proyeksi keinginan tersembunyi dari seseorang atau sekelompok orang tertentu serta bisa menjadi media yang pas untuk menghela nilai *cablaka* sebagai *local genius* Banyumas.

Nilai *cablaka* menjadi pusat atau inti model dari keseluruhan karakter *wong* Banyumas (orang Banyumas). *Cablaka* dan sikap egaliter merupakan identitas budaya *wong* Banyumas. *Cablaka* juga bisa ditafsirkan sebagai karakter kejujuran yang mengedepankan keterusterangan *wong* Banyumas. Jika bertutur kata mereka selalu tanpa basa-basi atau kepura-puraan untuk menyenangkan lawan tutur. Dalam perspektif individu atau masyarakat di luar kultur Banyumasan, hal tersebut mungkin akan tampak tidak memiliki unggah-ungguh (etika), lugas, dan terkesan kurang ajar (Lihat Priyadi, 2007, hlm. 13). Berdasarkan hal itu, dalam tulisan ini penulis menyebut nilai *cablaka* sebagai kejujuran (kelugasan) bertutur. Kejujuran bertutur berarti menyampaikan sesuatu secara apa adanya yang dapat direfleksikan melalui (1) cara berpikir, (2) bersikap, dan (3) berperilaku.

Dengan demikian, pembahasan *cablaka* yang kental dengan konteks kehidupan masyarakat Banyumas perlu ditinjau berdasarkan perspektif kebudayaan. Berikut ini adalah bagan yang menunjukkan posisi *cablaka* secara sistematis dan teoretik dalam perspektif subkebudayaan Banyumasan.



**Gambar 2 Bagan *Cablaka* sebagai Cerita Rakyat Banyumasan dalam Perspektif Kebudayaan**



### 3. Potensi Cerita Rakyat Banyumasan sebagai Penghela Nilai *Cablaka*

Cerita rakyat Banyumas sebagai monumen dokumentasi karakter masyarakat Banyumas merupakan cerita yang ada, tumbuh, dan berkembang di wilayah Banyumas yang tersebar karena tradisi lisan. Cakupan cerita rakyat Banyumas meliputi cerita rakyat yang membahas peristiwa yang terjadi di Banyumas, cerita yang membahas budaya Banyumas, dan cerita yang terkenal di Banyumas.

Tradisi lisan (folklor) mencerminkan suatu aspek kebudayaan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, dan tema-tema kehidupan yang mendasar. Entah mengapa, sebagian besar cerita rakyat Banyumasan menceritakan tentang skandal, pembunuhan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, memang benar dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik dalam proses mengapresiasinya agar nilai *cablaka* yang dipahami siswa tidak keliru.

Pada umumnya penyampaian nilai *cablaka* dipersonifikasikan pada cerita rakyat dalam bentuk karakter tokoh yang historistik. Tokoh yang kuat pada sebuah cerita secara tidak langsung akan memberikan gambaran mengenai identitas kultural yang dianut pada masyarakat tertentu. Dari berbagai cerita rakyat Banyumas, dianalisis nilai *kecablakaan* berdasarkan enam cerita pada judul cerita sebagai berikut.

Pertama, pada “Babad Pasir”, dikisahkan bahwa Adipati Banyak Thole secara *cablaka* menyatakan ia tidak mau tunduk kepada kekuasaan Demak, bahkan ia murtad dari agama Islam. Banyak Thole memperoleh banyak nasihat yang diberikan oleh pamannya yang menjabat patih, yaitu Wirakencana agar ia tidak melakukan pemberontakan kepada Demak karena prajurit Pasirluhur tidak mungkin sanggup menghadapi Demak. Atas nasihat pamannya ini, Banyak Thole bukannya sadar atas perilakunya, malah secara *cablaka* ia mengatakan kepada pamannya sebagai orang lelaki yang tidak mempunyai alat kelamin (Priyadi, 2007).

Karakter *cablaka* pada sosok Banyak Thole tentu bukanlah potensi *cablaka* pada cerita rakyat Banyumasan yang akan diajarkan kepada anak-anak sekolah dasar. Karakter *cablaka* memang sering kali mendatangkan kontroversi sebab spontanitas kejujuran yang cenderung *blak-blakan* bisa jadi malah menyakiti hati orang lain apabila tidak dilakukan pada situasi dan kondisi yang tepat.

*Kedua*, pada “Babad Baturraden” diceritakan seorang *gamel* (penjaga kuda) yang jatuh cinta kepada majikannya, yakni seorang putri. Kisah *batur* (pelayan) dan *raden* (majikan) inilah yang menjadi nilai historis tersendiri bagi masyarakat Banyumas. Dikisahkan, hubungan mereka tidak disetujui oleh keluarga sang *raden*. Akhirnya, *batur* dan *raden* pun menjalani kisah diam-diam. Pada puncaknya, mereka pun lari dari kerajaan. Perjalanan cinta mereka akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki. Pada akhir dari Babad Baturraden tersebut, tidak dikisahkan apakah keluarga sang *raden* menerima sang *batur* apa adanya atau tidak. Konon, tempat terakhir kali mereka tinggal di sebuah lereng Gunung Slamet akhirnya dinamai Baturraden.

Kisah semacam “Baturraden” tadi tentu perlu kelihaihan khusus sang pencerita ketika akan disampaikan kepada anak-anak sekolah dasar. Karakter *cablaka* yang dimiliki *raden* dan *batur* untuk mengakui hubungan mereka tentu harus disampaikan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak baik.





Ketiga, kisah lain, yakni “Asal-Usul Jalan Pekih”. Jalan Pekih merupakan suatu jalan di pusat Kota Purwokerto yang sangat ramai. Anehnya di tengah jalan terdapat makam yang konon bernama *Makam Ragasemangsang*. Peletakan makam di tengah jalan rupanya mengandung nilai historis tersendiri. Kiyai Pekih dikabarkan geram dengan aksi pencuri yang tak pernah dapat tertangkap. Kiyai Pekih adalah seseorang yang terkenal alim, arif, bijaksana, dan sakti. Setiap malam di daerah tempat tinggalnya selalu saja ada keributan yang disebabkan oleh sang pencuri. Pada suatu malam yang sudah direncanakan, Kiyai Pekih akhirnya berduel dengan pencuri tersebut. Pertarungan yang cukup sengit pun terjadi. Akhirnya, Kiyai Pekih dapat mengalahkan pencuri, bahkan raga sang pencuri *temangsang* (tersangkut) di atas pohon. Oleh sebab itu, daerah tersebut kini bernama Ragasemangsang.

Cerita tersebut sesungguhnya bisa menjadi cerita yang mengerikan apabila diceritakan dengan tidak selektif. Ke-*cablaka*-an dan kedigdayaan (kekuatan) Kiyai Pekih dalam menghadapi pencuri demi menyelamatkan warganya tentu merupakan bagian yang harus ditonjolkan, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan.

Keempat, hampir sama dengan cerita-cerita rakyat sebelumnya, “Babad Lesmana” pun memiliki cerita yang harus disampaikan dengan selektif. Diceritakan seorang pangeran bernama Tejaningrat yang jatuh cinta dengan seorang putri bernama Rara Hoyi. Dengan *cablaka* sang ayah menyatakan bahwa ia juga mencintai Rara Hoyi dan malah ingin menjadikannya sebagai selir. Tak terima dengan keadaan tersebut, Pangeran Tejaningrat menaruh racun di minuman ayahnya. Kisah tersebut pun berakhir tragis dengan penyesalan yang sangat mendalam pada diri Tejaningrat.

“Babad Lesmana” tersebut adalah contoh cerita yang terjadi pada seorang anak yang berani kepada orang tuanya. Pun akibat dari ke-*cablaka*-an yang tidak terkontrol. Untuk menceritakan cerita rakyat ini kepada anak-anak, dibutuhkan keselektifan dan pertimbangan khusus, terutama pada unsur ide yang terkandung dalam cerita serta kesesuaian sisi kejiwaan cerita rakyat dengan pembaca (Majid, 2008).

Kelima, lain lagi kisah Jaka Mruyung dalam “Babad Ajibarang”. Jaka Mruyung dikisahkan sebagai seorang anak yang diculik oleh perampok. Sebenarnya ia adalah anak seorang adipati bernama Munding Wilis. Meskipun dibesarkan oleh seorang perampok, Jaka Mruyung tetap tumbuh menjadi pemuda yang baik dan *cablaka*. Pada akhirnya Jaka Mruyung sampai pada titik pencarian jati diri yang membawanya menemukan orang tua kandungnya (Koderi, 1991).

Keenam, ke-*cablaka*-an lain juga dicontohkan pada kisah Adipati Warga Utama I yang tidak lain seorang raja di Banyumas. Kisah ini menjadi sangat fenomenal karena melahirkan mitos berupa pantangan bagi masyarakat Banyumas. Ke-*cablaka*-an dan kelega-an Adipati Warga Utama I dalam memaafkan prajurit yang mencelakainya karena salah paham itulah yang harus dicontoh.

Kisah Adipati Warga Utama tersebut melahirkan pantangan-pantangan bagi masyarakat Banyumas.

“Anak *dawuk-bang* (kuda warna coklat kehitaman dengan bintik-bintik putih). cucuku turun-temurun janganlah *besanan* atau menikah dengan keturunan Toyareka. Janganlah bepergian pada hari Sabtu Pahing.



Janganlah memelihara kuda, janganlah duduk di balai malang, dan jangan makan pindang angsa.”

(Sumber: *Sebuah Pendopo di Lembah Serayu*, Ratmini Soedjatmoko, Pustaka Tanjung, 2011)

Beberapa cerita rakyat Banyumasan tersebut berpotensi sebagai sarana penghela nilai *cablaka* jika disampaikan dengan tepat. Cara penyampaian yang tidak baik bisa jadi diterima dengan tidak baik pula meskipun sebenarnya pesan yang akan disampaikan itu sangat luhur.

Secara detail kajian ke-*cablaka*-an cerita rakyat Banyumas disajikan dalam matriks berikut ini.

**Tabel 1 Matriks Analisis Ke-*cablaka*-an dalam Cerita Rakyat Banyumasan sebagai Penghela Kejujuran**

No.	Judul Cerita	Substansi	Karakter	Kejujuran	Bertutur
			Kejujuran berpikir	Kejujuran bersikap	Kejujuran berperilaku
1	Babad Pasir	<i>Cablaka</i> Adipati Banyak Thole terhadap kekuasaan Kerajaan Demak	V	V	V
2	Babad Baturraden	<i>Cablaka</i> kisah mitologis <i>batur</i> (pelayan) dan <i>raden</i> (majikan)	V	V	V
3	Asal-usul Jalan Pekih	<i>Cablaka</i> Kiyai Pekih, seseorang yang terkenal alim, arif, bijaksana, dan sakti, serta makam Ragasemangsang	V	V	V
4	Babad Lesmana	<i>Cablaka</i> Pangeran bernama Tejaningrat yang jatuh cinta dengan seorang putri bernama Rara Hoyi	V	V	V
5	Babad Ajibarang	<i>Cablaka</i> sosok Jaka Mruyung diculik oleh perampok	V	V	V
6	Babad Banyumas	Ke- <i>cablaka</i> -an dan kelegaan Adipati Warga	V	V	V



No.	Judul Cerita	Substansi	Karakter Kejujuran berpikir	Kejujuran bersikap	Bertutur Kejujuran berperilaku
		Utama I dalam memaafkan prajurit yang mencelakainya			

#### 4. Strategi Mengadopsi Nilai *Cablaka* dalam Cerita Rakyat Banyumasan sebagai Muatan Pendidikan

Integrasi nilai *cablaka* sebagai penghela kejujuran dapat dilakukan dalam konteks pendidikan informal (keluarga) dan pendidikan formal (sekolah dasar dan menengah). Keduanya memiliki konsekuensi epistemologis yang berbeda.

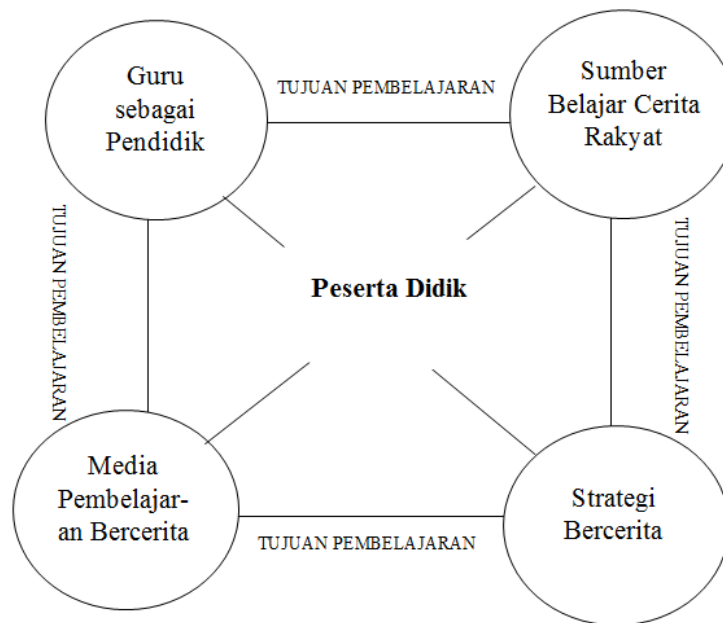
Pertama, *cablaka* secara informal dapat diterapkan melalui strategi enkulturasi antara orang tua dan anak-anaknya secara harmonis. Enkulturasi cerita rakyat dapat dilakukan dengan cara orang tua menceritakan kisah-kisah yang memuat kearifan lokal setempat.

Keluarga merupakan sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Di dalam lingkungan keluargalah diharapkan senantiasa tersedia kebutuhan, baik biologis maupun psikologis, bagi anak, serta perawatan dan pendidikan. Bercerita dalam keluarga dengan memasukkan kearifan lokal daerahnya sangatlah tepat. Wahi (2012) mengungkapkan bahwa lingkungan keluarga diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan anak-anak agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang dapat hidup di tengah-tengah masyarakatnya, dan sekaligus dapat menerima, menggunakan, serta mewarisi nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan.

Tegasnya, bercerita dalam keluarga ditentukan oleh faktor (a) ayah, (b) ibu, dan (c) lingkungan rumah yang humanis. Bercerita dalam keluarga berarti menanamkan peran-peran sosial dan kultural yang dipupuk terus-menerus melalui cerita rakyat sejak anak masih berusia dini sehingga pemikiran, sikap, dan perilaku senantiasa berpedoman kuat pada jati diri budayanya secara turun-temurun. Inilah substansi dari strategi enkulturasi di dalam ranah pendidikan informal.

Abdullah (2003) menyebut keluarga sebagai kelompok inti sebab keluarga adalah masyarakat pendidikan pertama yang bersifat alamiah. Di alam keluarga anak dipersiapkan oleh lingkungan keluarganya untuk menjalani tingkatan-tingkatan perkembangannya sebagai bekal untuk memasuki dunia orang dewasa. Bahasa, adat istiadat, dan seluruh isi kebudayaan merupakan pekerjaan yang dikerjakan keluarga dan masyarakatnya di dalam mempertahankan kehidupan.

Kedua, integrasi *cablaka* dalam konteks pendidikan formal sangat berkaitan dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia atau bahasa daerah di sekolah-sekolah melalui mata pelajaran terkait. Integrasi muatan karakter kejujuran dari nilai *cablakan* turut ditentukan oleh (1) peran guru sebagai pendidik, (2) sumber belajar, (3) media, dan (4) strategi. Gambar 3 berikut adalah bagan sistemik yang menunjukkan strategi pendidikan melalui cerita rakyat.



**Gambar 3 Bagan Sistemik Strategi Pendidikan melalui Cerita Rakyat**

Pertama, guru harus profesional. Guru tidak hanya dituntut untuk mendidik dan membelajarkan siswa dengan baik, tetapi juga dituntut untuk mengembangkan potensinya agar mempunyai keterampilan yang memadai untuk mendukung tugasnya (Morrison, 2004, hlm. 26). Beberapa guru bahasa perlu memahami peran cerita rakyat dalam memperkuat program sekolah. Singkatnya, cerita rakyat berbasis unsur-unsur tradisional dari cara hidup sekelompok orang dan ekspresi kreatif yang berkembang secara alami perlu digali dari wilayahnya. Dalam “Babad Baturraden” misalnya, tentu perlu kelihaihan khusus guru ketika akan menyampaikan cerita kepada peserta didiknya. Karakter *cablaka* yang dimiliki *raden* dan *batur* untuk mengakui hubungan mereka tentu harus disampaikan dengan sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak baik.

Kedua, sumber belajar kearifan cerita rakyat perlu digali. Sumber belajar merupakan aspek yang sangat penting. Tanpa penggalian cerita rakyat, pembelajaran bercerita akan terhambat. Cerita rakyat sebagai sumber belajar adalah faktor penting dalam kehidupan setiap murid. Warisan murid termasuk warisan rakyat dari semua kelompok yang berhubungan dengannya. Cerita rakyat yang paling penting bagi seorang anak adalah milik kelompok yang memiliki ikatan paling dekat dengannya.

Mclsaac (1996, hlm. 78) menegaskan bahwa belajar pada dasarnya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap di mana saja, kapan saja, dan dengan apa saja sebab sumber belajar terdapat di mana saja dan ada beragam jenisnya. Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembelajaran sangat beraneka ragam jenis dan bentuknya.

Ketiga, media penyampai pesan *cablaka* cerita rakyat perlu didukung dengan media yang menarik. Kemenarikan media penyampai cerita turut menentukan apresiasi siswa dalam pembelajaran bercerita. Sebagai media mengajar, guru



dapat menggunakan nada suara yang berbeda untuk karakter antartokoh dan menggunakan alat peraga berupa boneka, wayang, gambar, animasi digital, dan sejenisnya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya sekolah. Sudjana dan Rivai (2009) menyatakan bahwa penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada pemelajar. Media harus mampu merangsang pemelajar mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan daya tarik dalam belajar.

Keempat, strategi bercerita yang tepat juga memengaruhi keberhasilan penyampaian cerita rakyat sebagai muatan pembelajaran. Kegiatan sekolah yang khas yang melibatkan cerita rakyat keluarga termasuk penceritaan oleh guru dari dongeng, sajak, atau ucapan yang tepat, yang dapat menstimulasi pengumpulan materi serupa oleh siswa. Menurut Lwin (2015), pengajaran yang menekankan cerita rakyat sering mempromosikan pemahaman, penerimaan, dan penghargaan terhadap warisan budaya seseorang. Dalam mempelajari cerita rakyat setempat, siswa mungkin mengamati kelompok etnis dalam kegiatan liburan dan festival tradisional.

## PENUTUP

*Cablaka* sebagai karakter dalam cerita rakyat Banyumasan adalah segelintir dari ribuan kearifan budaya nusantara. Isinya sangat mendalam dan mampu menunjukkan refleksi pengetahuan, nilai, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Banyumas. Masyarakat Banyumas mempunyai dialek bahasa *ngapak-ngapak* yang ternyata mengandung makna mendalam, yakni mencerminkan karakter masyarakat Banyumas yang *cablaka*: egaliter, terus terang, jujur, dan tegas. Ke-*cablaka*-an inilah yang penulis sebut sebagai konsep “kejujuran bertutur”.

Potensi nilai *cablaka* sebagai kejujuran (kelugasan) bertutur memiliki potensi penghela kejujuran (karakter jujur). Kejujuran bertutur berarti menyampaikan sesuatu secara apa adanya yang dapat direfleksikan melalui (1) cara berpikir, (2) bersikap, dan (3) berperilaku.

Dibutuhkan strategi yang tepat dalam mengadopsi *cablaka* dalam konteks pendidikan informal dan formal. Secara informal, *cablaka* diterapkan melalui enkulturasi antara orang tua dan anak-anaknya secara harmonis. Secara formal, *cablaka* sangat berkaitan dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia atau bahasa daerah di sekolah-sekolah melalui mata pelajaran terkait. Integrasi muatan karakter kejujuran dari nilai *cablaka* turut ditentukan oleh (1) peran guru sebagai pendidik, (2) sumber belajar, (3) media, dan (4) strategi bercerita yang baik, benar, dan menarik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Imron. (2003). *Pendidikan Keluarga bagi Anak*. Cirebon: Lektor.
- Danandjaja, James. (2002). *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Endraswara, Suwardi. (2013). *Pendidikan Karakter dalam Folklor*. Yogyakarta: Pustaka Rumah Suluh.
- Koderi, M. (1991). *Banyumas Wisata dan Budaya*. Purwokerto: Penerbit Metro.
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



- Lukens, Rebecca J. (2003). *A Critical Handbook of Children's Literature*. New York: Longman.
- Lwin, S.M. (2015). "Using Folktales for Language Teaching". *The English Teacher*, XLIV(2), 74—83.
- Majid, Abdul Aziz Abdul. (2008). *Mendidik dengan Cerita*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiwarsito, L. (1979). *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*. Ende: Nusa Indah.
- McIsaac, M.S. dan Gunawardena. (1996). *Handbook of Research for Educational Communications and Technology*. New York: AECT.
- Morrison, G.R. (2004). *Designing Effective Instruction*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Nurgiyantoro, Burhan. (2005). *Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Priyadi, Sugeng. (2007). *Cablaka sebagai Inti Model Karakter Manusia Banyumas*. *Diksi: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Vol. 14, No. 1, 11—18.
- Priyono, Kusumo. (2006). *Terampil Mendongeng*. Jakarta: Grasindo.
- Putnam, John F. (1964). "Folklore: A Key to Cultural Understanding". *Educational Leadership*, March 1964, Vol. 21 Issue 6, p.364.
- Sarumpaet, Riris K. (1976). *Bacaan Anak-anak Suatu Penyelidikan Pendahuluan ke dalam Hakikat, Sifat, dan Corak Bacaan Anak-anak serta Minat Anak pada Bacaannya*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Soedjatmoko, Ratmini. (2011). *Sebuah Pendopo di Lembah Serayu*. Jakarta: Pustaka Tanjung.
- Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. (2009). *Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatan)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiarto, Eko. (2013). "Nilai-nilai Karakter dalam Pembelajaran Apresiasi Seni Berbasis Multikultural". *Jurnal Sabda*. Volume 8, Tahun 2013, 52—62.
- Sugiarto, Eko, Tjetjep Rohendi Rohidi, & Dharsono Sony Kartika. (2017). "The Art Education Construction of Woven Craft Society in Kudus Regency". *Harmonia: Journal of Arts Research and Education* 17 (1), 87—95.
- Wahi, Hasbi. (2012). "Keluarga sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama". *Jurnal Ilmiah Didaktika*. Februari 2012 Vol. XII No. 2, 245—258.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Meina Febriani  
Judul Makalah : “*Cablaka*: Penghela Kejujuran dalam Cerita Rakyat Banyumasan dan Urgensinya sebagai Muatan Pendidikan”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.00  
Moderator : Dra. Yanti Riswara, M.Hum.  
Pencatat : 1. Elvi Suzanti  
                  2. Inayatushalihah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. *Cablaka* memiliki nama lain *blaka suta*, yakni mengungkapkan sesuatu tanpa tedeng aling-aling dan ditutup-tutupi.
2. Cerita rakyat merupakan produk kebudayaan yang mengandung produk, perilaku, dan gagasan. Cerita rakyat memiliki kandungan nilai-nilai dan konsep hidup masyarakat, bahkan menjadi pedoman dan sekaligus refleksi sikap dan perilaku masyarakat pendukungnya. Demikian pula halnya *cablaka* sebagai cerita rakyat Banyumasan.
3. Cerita rakyat sebagai produk sastra lokal menjadi salah satu alat yang efektif untuk merepresentasikan ke-*cablak*-an masyarakat Banyumas yang tanpa tedeng aling-aling.
4. Dalam pewayangan dikenal *cablakan* yang serius atau *thokmelong*. Wayang gagrag Banyumasan menjadi media untuk menyatakan ke-*cablak*-an atau ke-*thokmelong*-an masyarakat Banyumas (sesama Banyumasan).
5. Sesungguhnya dalam ke-*cablak*-an terkandung kejujuran berpikir, bersikap, dan berperilaku. Oleh karena itu, *cablakan* berpotensi sebagai penghela nilai kejujuran.
6. Ada enam cerita rakyat Banyumasan yang mengandung nilai *cablaka*, yaitu “Babad Pasir”, “Babad Baturraden”, “Asal-Usul Jalan Pekih”, “Babad Lesman”, “Babad Ajibarang”, dan “Kisah Adipati Warga Utama I”.
7. Penanaman nilai *cablaka* sebagai penghela kejujuran dapat dilakukan secara informal dan secara terintegrasi dalam konteks pendidikan formal.
8. Secara informal, *cablaka* dapat diterapkan melalui strategi enkulturasi antara orang tua dan anak-anaknya.
9. Strategi yang tepat diperlukan dalam mengadopsi *cablaka* dalam konteks pendidikan informal atau formal.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Mappatutu  
Instansi : IKAPI DKI Jakarta



**Pertanyaan:**

Peserta didik seharusnya diwajibkan untuk membaca cerita rakyat dalam tiap jenjang pendidikan dengan jumlah cerita yang berbeda.

**Jawaban:**

Saya sangat setuju dengan usulan Bapak. Di Banyumas sejak tahun 2000-an sudah ada muatan lokal mengenai budaya Banyumasan. Materi cerita rakyat tersebut akan lebih bagus ditulis dengan menggunakan bahasa daerah.

**Penanya 2**

Nama : Gifari

Instansi : UN Malang

**Pertanyaan:**

Bagaimana bentuk *cablaka*?

**Jawaban:**

Konsep *cablaka* ada tiga, yaitu *cablaka* berpikir, *cablaka* bersikap, dan *cablaka* berperilaku. Itu sebuah konsep yang sistemik. *Cablaka* ada dua jenis, yaitu (1) *cablaka* yang bermakna jujur berbicara tanpa *tedeng aling-aling* dan (2) *cablaka* yang bermakna *penjorangan* (ledekan).

**Penanya 3**

Nama : Pandu Dian Pratama

Instansi : SMKN 6 Malang

**Pertanyaan:**

Di Malang *cablaka* disebut ceplas-ceplos. Di dalam dunia pendidikan, cerita rakyat sangat sedikit diajarkan di SMA atau SMK. Dalam dua semester hanya diajarkan satu cerita. Tantangan dalam pengajaran cerita rakyat, terutama di SMK, adalah anak-anak mengalami kesulitan dalam menceritakan kembali cerita rakyat. Peran guru, strategi, dan media apa yang tepat dalam pengajaran cerita rakyat?

**Jawaban:**

Tulisan saya tidak membahas cara mengungkapkan kembali *cablaka*, tetapi nilai-nilai kejujuran yang terkandung dalam *cablaka*. Cara pengajaran cerita rakyat dapat dilihat dalam bagan sistemik, yakni bagan sistemik strategi pendidikan melalui *cablaka* atau cerita rakyat yang mencakup guru sebagai pendidik, media pembelajaran bercerita, sumber belajar cerita rakyat, dan strategi bercerita.

**Penanya 4**

Nama : Afik Maulana

Instansi : STKIP Surabaya

**Pertanyaan:**

Bagaimana indikator nilai kejujuran tertanam pada anak didik?





**Jawaban:**

Indikator kejujurannya tidak dikaji dalam tulisan saya.

**Penanya 5**

Nama : Yayah B. Lumintaintang

Instansi : Jakarta

**Pertanyaan:**

Di Sunda *cablakan* dikenal dengan *cablak* yang berkonteks konotatif untuk penutur yang berbicara ceplas-ceplos, biasanya digunakan untuk membual.

**Jawaban:**

Di Banyumas *cablaka* berkonotasi positif, tidak negatif seperti *cablak* dalam Sunda.

**Penanya 6**

Nama : Eri

Instansi : Balai Bahasa Jawa Tengah

**Pertanyaan:**

1. Masyarakat Malang mengenal cerita rakyat Malang tidak? Maksudnya, cerita yang dijadikan bahan ajar hendaknya cerita rakyat yang dikenal dalam masyarakat tersebut.
2. Cerita yang mengandung kekerasan sangat mengkhawatirkan jika dijadikan sebagai bahan ajar. Anak-anak lebih menerima apa yang tersurat daripada yang tersirat. Oleh karena itu, ketika menyusun cerita rakyat yang akan dijadikan bahan ajar, kita harus selektif. Jika ada kekerasan atau pornografi, itu dapat diungkapkan secara simbolik atau diubah. Cerita rakyat sah-sah saja diubah selama pakemnya tidak diubah.

**Jawaban:**

1. Ketika kita mempunyai kemampuan untuk menyajikan cerita rakyat yang berasal dari masyarakat itu, imaji akan terbentuk karena didasari rasa bangga.
2. Buku cerita rakyat yang sudah saya susun tidak segera diterbitkan karena ada keraguan mengenai kekerasan yang terkandung dalam cerita tersebut.

**Isu-Isu Penting:**

Cerita rakyat yang telah diseleksi harus dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah, dari jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi.



## 8. Ketidakstabilan Ruang Tubuh sebagai Strategi Pascakolonial Melalui Karya Sastra Indonesia

### KETIDAKSTABILAN RUANG TUBUH SEBAGAI STRATEGI PASCAKOLONIAL MELALUI KARYA SASTRA INDONESIA

**Risma Nur Rahmawati**

LPIDP Universitas Muhammadiyah Surakarta

rismarahmawati53@gmail.com

#### **Abstrak**

Tulisan ini membahas ketidakstabilan ruang yang menjadi strategi kekuatan bangsa terhadap wacana kolonial. Menurut Upstone, ruang yang cair adalah bentuk strategi pascakolonial dalam melawan bangsa Barat. Walaupun keberadaan penjajah di wilayah okupasi sudah tidak ada lagi, mereka masih menanamkan strategi penjajahan melalui pikiran, yaitu ruang-ruang yang ditinggalkan dan dibentuk menjadi ruang yang seakan-akan mutlak tidak dapat tergoyahkan. Hal ini bertujuan agar bangsa bekas jajahan tetap mudah dikontrol. Akan tetapi, hal ini tidak semata-mata diterima oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa bekas jajahan sebab ada upaya resistansi melalui kecairan ruang. Tujuan dari makalah ini untuk menguraikan strategi bangsa Indonesia dalam melawat konstruksi dari wacana kolonial. Selain itu, makalah ini juga membahas bagaimana ruang-ruang yang cair menjadi strategi kultural bangsa Indonesia melalui karya sastra. Metode yang dipergunakan dalam makalah ini adalah deskriptif kualitatif. Makalah ini akan membahas karya Eka Kurniawan, Triyanto Triwikromo, dan Danarto yang memberikan alternatif strategi terhadap kolonialisme dengan karyanya yang memiliki unsur kemagisan (*realism-magis*). Tokoh yang ditampilkan adalah tokoh yang tidak berwujud, moksa, dan dapat melakukan transformasi dunia antara dunia gaib dan dunia nyata. Ruang-ruang yang tidak stabil inilah yang menjadi strategi bangsa Indonesia melawan wacana kolonial. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa karya yang mengandung kemagisan merupakan salah satu alternatif solusi membentuk ruang yang cair sebagai bentuk resistansi terhadap wacana kolonial sehingga karya sastra Indonesia memiliki andil dalam penguatan kultural bangsa Indonesia.

**Kata-kata kunci:** ruang, Sara Upstone, tubuh, Chora, pascakolonial

#### **Abstract**

*The paper talks about the spatial instability which becomes the nation's strength strategy to the colonial discourse. According to Upstone, the fluid space is the form of the postcolonial strategy in striving against the Western colonialization. Although the colonialist existence in the occupation area is no longer around, they still plant the colonialization strategy through the mind that is the spaces left which is formed into the space as if it is absolutely unable to lose. It aims that the colony people are still easy to control. However, it is not merely accepted by the Indonesian people as the colony because there is a resistance effort through the spatial fluidity. The paper will discuss the work of Eka Kurniawan, Triyanto Triwikromo, and Danarto which provides an alternative strategy toward colonialism with the work which has the magic realism element. The character portrayed is the intangible character namely Moksa and also can perform the*



*transformation of the unseen world and the real world. These unstable spaces are those which become the Indonesian people strategy to strive against the colonial discourse.*

**Keywords:** *space, Sara Upstone, body, Chora, postcolonial*

## PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari negara yang pernah mengalami okupasi, khususnya oleh negara Belanda, sisa-sisa ingatan bangsa Indonesia sebagai negara terjajah masih ada sampai saat ini. Berbagai upaya dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk melupakan ingatan penjajahan dengan melakukan strategi terhadap pembentukan bangsa baru yang utuh pascakemerdekaan. Kedatangan Belanda ke Indonesia tidak hanya bertujuan untuk pendudukan secara geografis, tetapi Belanda juga melakukan pengawasan secara politik dan psikologis terhadap bangsa Indonesia pascapenjajahan. Misalnya, terjadi pada konstruksi strata sosial masyarakat pribumi yang tetap tidak berubah (Kahin, 1955, hlm. 1). Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah dengan cara melestarikan kearifan lokal sebagai tradisi yang selama ini dianggap sebagai budaya asli sebelum kedatangan para penjajah walaupun hal ini tidak dapat sepenuhnya melepaskan konstruksi budaya Barat. Hal ini senada dengan pendapat Lo dan Helen yang menyatakan bahwa Indonesia tidak dapat begitu saja terlepas dari penjajahan (dalam Faruk, 2007, hlm. 15). Sebelum meninggalkan wilayah jajahan, Belanda sudah menanamkan strategi yang dipergunakan untuk melakukan kontrol terhadap wilayah jajahannya agar masih tetap dapat dilakukan pengawasan. Hal ini dapat terlihat dari kebanyakan masyarakat yang masih memandang bahwa negara Barat lebih unggul dari negara Timur. Terlihat juga, misalnya dari penggunaan struktur bidang hukum masyarakat Indonesia masih menggunakan pemberian dari Barat. Upaya kontrol yang dilakukan Barat terhadap Timur adalah homogenisasi pada setiap lini yang bertujuan untuk mempermudah pengawasan.

Tujuan makalah ini adalah menguraikan strategi bangsa Indonesia dalam melawan konstruksi wacana kolonial. Selain itu, makalah ini juga membahas bagaimana ruang-ruang yang cair menjadi strategi kultural bangsa Indonesia melalui karya sastra. Banyak karya-karya sastra yang secara terbuka menggambarkan permasalahan pascakolonial. Misalnya, tulisan Pramoedya Ananta Toer: *Bumi Manusia, Pulau Buru, Anak Semua Bangsa*, dan sebagainya. Konten yang ditawarkan pada karya pascakolonial adalah adanya perlawanan terhadap bangsa Barat atau kuasa kolonial. Menurut Rahariyoso, indikasi yang mencerminkan sebuah karya sastra memiliki wacana kolonial juga dapat ditinjau melalui wacanan identitas, struktur oposisi tokoh, mimikri, konstruksi ruang kolonial, dan sebagainya (2004, hlm. 43—44).

Pada kerangka pascakolonial, tubuh menjadi salah satu konstruksi yang penting. Tubuh merupakan bagian vital dari individu. Tubuh menjadi pembaca pengalaman kolonial yang tidak dapat terhapuskan. Wacana-wacana kolonial direpresentasikan melalui tubuh individu. Tubuh menjadi objek yang penting dalam kelangsungan kolonialisme yang dapat dilakukan kontrol terhadapnya. Tubuh dapat menerima adanya kontrol yang membelenggu secara normatif dan masuk dalam tatanan ketidaksadaran. Ideologi kolonial yang masuk pada ranah tubuh sudah ditransfer secara turun-temurun sebagai wujud kolonial yang tidak tampak. Akan tetapi, tubuh masyarakat bekas jajahan tidak begitu saja menerima



kontrol Barat karena tubuh sendiri adakalanya melakukan resistansi. Bangsa penjajah dengan sengaja meninggalkan ideologi yang homogen terhadap bangsa terjajah agar mudah terkontrol. Pada ruang tubuh sengaja dicitrakan sebagai bentuk yang normatif agar tidak melakukan perlawanan. Pada kenyataannya, tubuh setiap idividu memiliki citra yang tidak sama satu dan yang lain yang tidak terbatas—yang heterogen. Hal ini bertolak belakang dengan wacana kolonial bahwa tubuh memiliki pola-pola yang sama. Tujuan bangsa koloni melakukan batas pada ruang bangsa terjajah, tidak lain bertujuan agar mudah dilakukan kontrol. Namun, upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil sebab bangsa terkoloni sudah memiliki pandangan terdahulu sebelum adanya pendudukan wilayah sebagai objek jajahan/okupasi. Tubuh bangsa bekas jajahan memiliki pandangan yang tidak terbatas pada tubuh itu sendiri karena setiap individu memiliki otoritas tersendiri dalam menentukan pandangannya terhadap wilayah tubuh yang bersifat cair. Hal ini senada dengan pandangan Upstone bahwa ruang pascakolonial menolak padangan kolonial tentang kestabilan wilayah sebab wilayah tidak bertitik tumpu hanya sekadar wilayah, tetapi negosiasi yang memiliki pandangan/suara yang heterogen – tidak terkecuali pada tubuh (Upstone, 2009, hlm. 13).

Dalam bidang kesastraan, perlawanan terhadap konstruksi tubuh yang telah menjadi pemberian bangsa Barat banyak menghasilkan penolakan, bahkan resistansi. Tubuh selalu digambarkan secara normatif. Pada kenyataannya, dalam karya sastra tidaklah selalu demikian. Tubuh menjadi wilayah yang bebas, maksudnya memiliki sifat heterogen yang dapat menembus batas. Keheterogenan tubuh biasanya tampak pada karya-karya bergenre *realism-magis*, yaitu karya-karya yang banyak memiliki unsur kemagisan. Misalnya, dalam novel karya Eka Kurniawan yang berjudul *Cantik Itu Luka* digambarkan tubuh yang tidak memiliki bentuk, tidak berupa. Kemagisan juga nampak pada karya-karya Triyanto Triwikromo yang menggambarkan tokoh yang dapat moksa dan menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Demikian juga dengan karya-karya Danarto yang menggambarkan tokoh-tokoh yang juga tidak berwujud. Tokoh-tokoh hewan dan tumbuhan dapat berbicara dengan manusia. Menurut Uptone, karya yang memiliki unsur realisme-magis merupakan salah satu bentuk resistansi terhadap kehomogenan ruang yang dibuat oleh kolonial. Pada makalah ini, akan dijabarkan karya Eka Kurniawan, Triyanto Triwikromo, dan Danarto yang menggambarkan ketidakstabilan ruang, khususnya ruang tubuh sebagai wujud perlawanan pada wacana kolonial.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif secara keseluruhan memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi, yakni berupa kata-kata tertulis serta perilaku yang bisa diamati (Ratna, 2011, hlm. 46). Data penelitian adalah sumber informasi yang akan diseleksi sebagai bahan analisis (Siswanto, 2010, hlm. 70). Adapun data dalam penelitian ini berupa kalimat atau dialog antartokoh yang berhubungan dengan ruang dan kolonialisme. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan bahan, baik secara primer maupun sekunder. Sumber data dari makalah ini adalah novel karya Eka Kurniawan berjudul *Cantik itu Luka*, Novel Triyanto Triwikromo berjudul *Surga Sungsang*, dan cerpen milik Danarto berjudul “Megatruh”. Urgensi dari penelitian ini adalah melihat upaya-upaya



resistensi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menghilangkan jejak-jejak penjajahan bangsa Barat yang dapat dikatakan berhasil (walaupun tidak sepenuhnya). Sebagai negara bekas jajahan, bangsa Indonesia tidak sepenuhnya tunduk pada aturan-aturan Barat. Bangsa Indonesia melakukan strategi perlawanan sebagai kekuatan kultural bangsa melalui penulisan karya-karya sastra.

## LANDASAN TEORI

Orientalisme merupakan karya besar yang ditulis oleh Edward Said yang mengulas pandangan orang Barat mengenai Timur. Setelah lepasnya bangsa Timur terhadap dominansi Barat, tidak begitu saja membuat bangsa Timur menjadi terbebas sepenuhnya. Jejak-jejak kolonial sampai saat ini masih memengaruhi cara pandang bangsa Barat terhadap Timur. Timur sebagai bekas jajahan Barat memang sengaja ditimurkan oleh Barat. Bagi Said, relasi yang terbangun di antara keduanya adalah relasi kekuasaan, hegemoni, dan dominasi (Said, 2010, hlm. 1—2). Menurut Upstone, kolonialisme sebagai klaim wilayah masuk pada penyebaran agama nasrani (*religious evangelism*), pembangunan ekonomi (*economic development*), dan penyebaran wilayah (*lebensraum*) (Upstone, 2009, hlm. 4). Selain itu, Loomba menyatakan bahwa pascakolonialisme bukan sesuatu hal yang datang setelah kolonialisme, melainkan lebih memiliki arti yang lebih longgar, yaitu perlawanan terhadap dominasi kolonialisme dan warisannya (2003, hlm. 15). Loomba juga menyatakan bahwa kolonialisme modern tidak hanya terdapat pada upaya penguasaan materi yang meliputi penguasaan wilayah, tetapi masuk pada unsur penstrukturan kembali wilayah yang dikuasai (Loomba, 2003, hlm. 8—9). Sementara itu, menurut Gandhi, poskolonialisme mendefinisikan dirinya sebagai bidang kajian yang tidak hanya membuat, meraih, dan memahami teoretis masa lalu. Dampak terjadinya kolonialisme memerlukan teori yang amelioratif yang responsif terhadap tugas dalam mengingat dan mengenang masa lalu (Gadhi, 2006, hlm. 6—10).

Masa kolonialisme bangsa terjajah adalah masa okupasi yang dilakukan oleh penjajah–bangsa Barat untuk menguasai wilayah geografis dan mengambil kekayaan wilayah koloni untuk kesemakmuran bangsanya sendiri. Kemudian, pascakolonialisme tidak berarti sebagai konsep yang datang sesudah kolonialisme, tetapi lebih luas dapat diartikan sebagai penguasaan wilayah yang masuk pada gagasan terhadap wilayah yang pernah dikuasai melalui jejak sebelum mereka meninggalkan wilayah jajahan.

## METODE PENELITIAN

Ruang adalah konsep yang lebih filosofis daripada studi lokasi, “*Toward space rather than place, toward a philosophical concept rather than a study of location*” (Upstone, 2009, hlm. 3). Ruang direpresentasikan melalui tempat (*place*), tetapi tidak hanya berhenti di titik pengidentifikasian tempat, tetapi melalui tempat, ruang dapat diidentifikasi lebih lanjut. Menurut Upstone, pendekatan kolonial berhubungan dengan politik ruang. Maksudnya, koloni yang pernah menduduki wilayah jajahan, tetapi setelah kepergian dari wilayah okupasinya, mereka masih meninggalkan ruang-ruang jajahan untuk tetap dapat melakukan kontrol kolonial. Menurut Upstone, ruang terbagi menjadi beberapa level, yaitu *nation*, *journey*, *city*, *home*, dan *body*. Para pengarang pascakolonial



melakukan resistansi terhadap ruang dengan cara alternatif interogasi (mempertanyakan kembali) ruang yang telah dibentuk oleh koloni sebelumnya (2009, hlm. 11).

Ruang menurut kolonial digambarkan sebagai hal yang mutlak dan homogen. Batas-batas menjadi hal yang mutlak tidak dapat dirusakkan oleh afiliasi lokal, wilayah yang membatasi harus dihormati sebagai entitas yang sah. Para penjajah mendefinisikan ruang memiliki batas yang tetap dan tidak dapat digoyahkan agar mudah dilakukan kontrol yang termanifestasikan melalui fisik (*place*) (Upstone, 2009, hlm. 4). Para koloni membuat seakan-akan batas yang diciptakan adalah natural yang dipergunakan untuk mengamankan kekuasaan. Misalnya, penyusunan rumah seseorang terdiri atas ruang tamu yang berada di tempat paling depan, dapur berada di belakang, dan keseluruhan ruang rumah haruslah rapi. Namun, tidak berhenti di titik ini saja sehingga Upstone mencetuskan istilah *overwriting* yang berhubungan dengan ruang yang berarti bahwa apa yang pernah dituliskan sebelumnya dihapuskan dan diganti dengan penstrukturan ruang yang baru. Ruang menurut pandangan pascakolonial bersifat cair (tidak mutlak seperti keinginan para koloni). Melalui *fluiditas* ruang, penulis pascakolonial memunculkan istilah heterogen yang bersifat beragam yang disebut *chaos*. “*Foregrounding a more fluid and chaotic space, I would argue, is at the centre of the postcolonial spatial imagination*” (2009, hlm. 11).

Menurut Upstone, latar depan dari sebuah ruang yang berubah-ubah dan kacau merupakan inti dari imajinasi keruangan pascakolonial. *Chaos* diartikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap batas kolonial. *Chaos* adalah destabilisasi yang pada akhirnya menawarkan kebaruan arti. *Chaos* adalah pelanggaran terhadap batas kolonial melalui keberagaman yang berfungsi sebagai upaya pembongkaran terhadap pandangan yang dianggap tetap dan menanamkan pola-pola pemahaman serta pengalaman-pengalaman baru sehingga dibutuhkan *fluiditas* ruang yang tidak didapatkan dalam konsep kolonial dan tradisi atau dari konsep Barat dan Timur yang sudah dibatasi kondisi tersebut. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan *post-space*. Upstone menjelaskan *post-space* sebagai konsep yang berada di luar batas-batas tersebut muncul, keadaan tersebut juga dikatakan sebagai ruang yang *hybrid*, cair, dan ruang yang bergerak sehingga tidak memiliki batas-batas lagi.

## PEMBAHASAN

Makalah ini akan membahas ruang hanya pada level tubuh. Upstone menawarkan alternatif ruang tubuh yang *chora* sebagai bentuk resistansi terhadap tubuh yang kaku. Gagasan pascakolonial bukan berarti menolak keberadaan tubuh sebab manusia tidak akan terlepas dari wujud tubuh itu sendiri. Namun, tubuh dalam pandangan pascakolonial dapat melakukan agensi. Tubuh bukanlah entitas yang kaku dengan batas-batas tetap yang didefinisikan oleh koloni pada wilayah jajahannya, melainkan tubuh membutuhkan redefinisi terus menerus untuk mempertanyakan kekuasaan kolonial yang ditanamkan. Bagi Upstone, kritik terhadap tubuh merupakan salah satu upaya resistansi bagi pengarang pascakolonial.

Secara eksplisit, *chora* adalah identitas cair yang dimiliki oleh tubuh, yaitu sebuah upaya untuk terus-menerus menolak kungkungan atas batasan natural tubuh yang sudah ditentukan oleh kolonial. Menurut Upstone, *chora* adalah tubuh



yg *choric*, yaitu dapat ditembus, bukan tubuh, bahkan bentuk yang ditolak. Tubuh yang cair akan merusak tatanan kolonial karena melepaskan ketergantungan pada tubuh yang disetereotipkan oleh penjajah. Tubuh *chora* membedakan dengan tubuh-tubuh yang jasmani sebab ia memasuki alam lain yang kadang tidak dapat dikonstruksi dengan akal pikiran manusia.

*Chora* memberikan kemungkinan terjadinya *chaos* dalam wacana kolonial yang akan diasumsikan sebagai hal yang membahayakan, dalam usahanya (kolonial) menghasilkan kategorisasi dan pengaturan tubuh yang selama ini digunakan untuk pencitraan wacana tersebut (Rahiriyoso, 2014, hlm. 48). Teks mengakui adanya kemampuan tubuh untuk mengambil bentuk yang berbeda dan dalam kategori ini tubuh merusak kategori absolut. Terkadang *fluiditas* ruang tubuh juga menghadirkan “kekerabatan binatang” di luar bingkai ketat atau mutlak sehingga adanya bentuk hewan yang bergabung dengan orang lain dan juga dengan manusia. Seperti padangan Upstone, tubuh yang *choric* dapat direpresentasikan melalui tubuh yang magis, metamorfosis, metafora, dan metonimi. Hal itu dapat dilihat dari karya-karya yang mengandung unsur *realism-magis*. Tubuh yang *choric* mempertentangkan antara kegaiban dan kenyataan. Upstone memberikan penegasan bahwa tubuh pascakolonial diejawantahkan melalui bentuk realis-magis yang dapat menjadi alternatif bagi bentuk cair terhadap tubuh tersebut (Upstone, 2009, hlm. 167).

Realisme magis ditandai oleh kemampuan visual, yaitu kemampuan untuk menciptakan makna (magis) dengan membayangkan hal-hal biasa dengan cara luar biasa. (Zamora dalam dalam Muhtarom, 2014, hlm. 273). Karya sastra yang mengandung unsur realisme-magis dapat dilihat sebagai salah satu bentuk resistansi terhadap pandangan kolonial yang membentuk tubuh sebagai kesatuan yang kaku. Misalnya, novel dan cerpen yang mengandung unsur kemagisan menampilkan *chaos* sebagai bentuk resistansi. Realisme-magis digambarkan sebagai keadaan yang menganggap normal peristiwa magis, tetapi tidak melepaskan kemungkinan dari defamiliarisasi (Burhan, 2014, hlm. 25). Seperti halnya pada skala tubuh, penulis yang menganut genre realisme-magis memunculkan tubuh-tubuh yang imajiner, tidak berbentuk, bahkan dapat menembus batas ruang dan waktu. Hal ini tampak pada karya-karya Eka Kurniawan, Triyanto Triwikromo, dan Danarto yang akan dianalisis dalam makalah ini sebagai wujud resistansi terhadap pandangan kolonial melalui tubuh.

Pada novel yang berjudul *Cantik itu Luka*, terdapat tokoh yang digambarkan sangat cantik bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah tokoh keturunan Belanda dan pribumi. Neneknya adalah seorang pribumi bernama Mak Iyang yang terpaksa menjadi gundik Belanda yang bernama Ted Stammler. Diceritakan pada novel tersebut bahwa tokoh Dewi Ayu sudah meninggal selama dua puluh tahun, tetapi tiba-tiba ia membuat warga desa ketakutan karena kebangkitannya dari kubur.

“Sore Hari di akhir pekan bulan Maret, Dewi Ayu bangkit dari kuburan setelah dua puluh satu tahun kematiannya.” (Kurniawan, 2012, hlm. 1)

Sebagai keturunan campuran antara bangsa Barat dan bangsa Timur, Dewi Ayu lebih memilih menjadi bangsa Timur. Semenjak kecil Dewi Ayu sudah dibuang di depan pintu oleh kedua orang tuanya yang melakukan pernikahan saudara. Sebagai bangsa Belanda yang ditugaskan untuk menjajah Indonesia, keluarga Ted Stammler yang tidak lain adalah kakek Dewi Ayu dan nenek tirinya, Oma Marietje, tinggal di wilayah yang bernama Halimunda, wilayah yang sangat



terpencil. Setelah kedatangan bangsa Jepang yang mengeser kedudukan bangsa Belanda, orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia ditangkap, bahkan dibunuh. Keadaan ini membuat Ted Stammer harus menjadi tentara relawan Belanda. Sementara, Marietje memutuskan untuk kembali ke Belanda dengan mengajak cucunya, Dewi Ayu. Namun, penolakan dilakukan oleh Dewi Ayu yang memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia.

“Jangan tolol, Nak,” kata Hanneke. “Jepang tak akan melewakanmu.”

“Oma, namaku Dewi Ayu dan semua orang *tau* itu nama pribumi.”  
(Kurniawan, 2012, hlm. 47).

Dewi Ayu memutuskan tetap tinggal di Indonesia dengan tujuan tersembunyi. Ia mengetahui bahwa dirinya adalah keturunan orang pribumi, Mak Iyang. Sebelum menjadi gundik Ted Stammer, Mak Iyang sudah memiliki lelaki idaman bernama Ma Gedik. Ma Gedik menjadi lelaki gila setelah ditinggal oleh Mak Iyang yang juga bunuh diri setelah dipaksa menjadi gundik Ted Stammer. Keberadaan Dewi Ayu di Hindia-Belanda (kala itu) salah satunya untuk meminta maaf kepada Ma Gedik atas perlakuan Ted Stammer yang merebut Mak Iyang. Sebagai cucu Mak Iyang, Dewi Ayu memutuskan menikah dengan Ma Gedik. Beberapa bukti dipaparkan bahwa Dewi Ayu sebagai representasi Timur sebab ia lebih memilih tetap tinggal di Hindia-Belanda.

Keberadaan Dewi Ayu yang tetap berada di wilayah jajahan membuat ia menjadi seorang pelacur hingga memiliki tiga anak bernama Alamanda, Adinda, dan Maya Dewi. Ketiga anak Dewi Ayu sangatlah cantik sehingga membuat banyak lelaki tergila-gila pada ketiganya. Tidak disangka, Dewi Ayu yang sudah tua harus melahirkan anak keempatnya yang diberi nama Cantik. Upaya pembunuhan sudah dilakukan oleh Dewi Ayu agar si jabang bayi meninggal, tetapi tidak berhasil sebab si bayi lebih ingin hidup di dunia. Keheranan timbul dari dukun bayi yang membantu kelahiran bayi Dewi Ayu. Digambarkan bahwa bayi tersebut tidak berwujud seperti manusia, tetapi seperti tumpukan kotoran manusia.

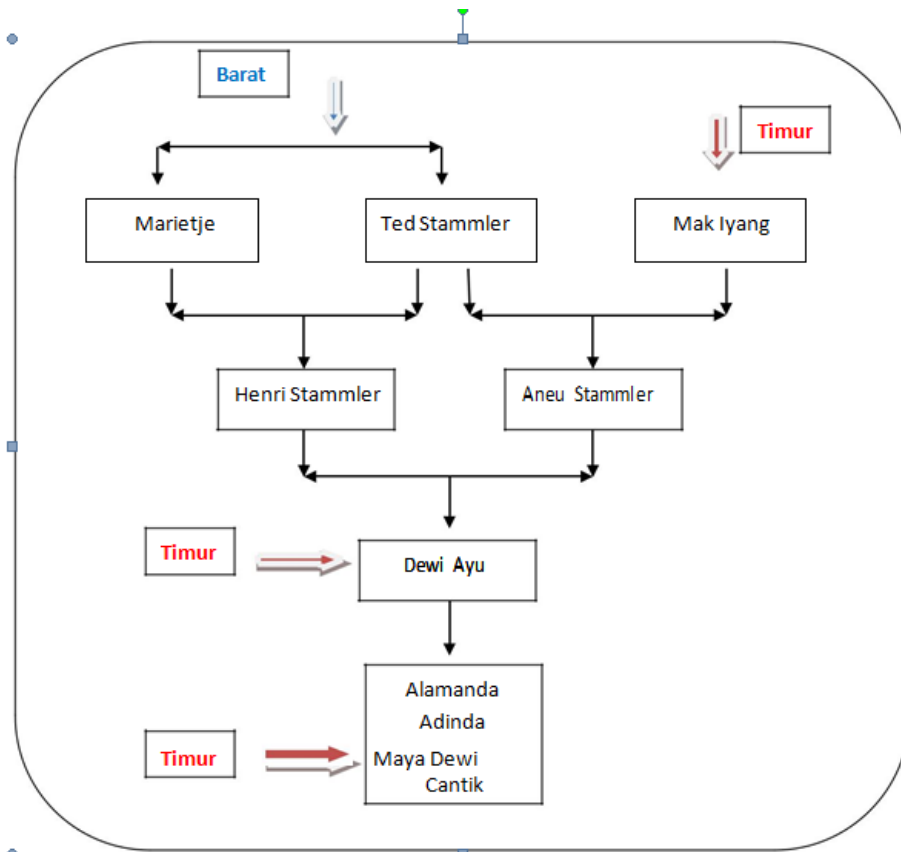
“Si bayi terbungkus rapat oleh belitan kain dalam gendongan si dukun bayi, kini mulai menangis dan meronta. Seorang perempuan keluar masuk kamar, megambil kain-kain kotor penuh darah, membuang ari-ari, selama itu si dukun bayi tak menjawab pertanyaannya sebab ia tak mungkin mengatakan bayi yang menyerupai onggokan tai hitam itu sebagai bayi yang cantik.” (Kurniawan, 2012, hlm. 3)

Tokoh-tokoh yang diceritakan Eka Kurniawan pada novelnya menggambarkan tubuh yang tidak berbentuk seperti anak Dewi Ayu yang bernama Cantik. Seperti pandangan Usptone, tubuh *choric* adalah tubuh yang tidak berbentuk, tubuh yang cair dan dapat menembus batas-batas dunia nyata. Setelah kelahiran anaknya, Dewi Ayu memutuskan untuk meninggal dunia. Kebangkitan Dewi Ayu setelah kematiannya menunjukkan bahwa Dewi Ayu dan keturunannya sebagai representasi Timur dapat mengambil ruang-ruang yang cair. Berbeda dengan tokoh-tokoh yang digambarkan Eka pada novelnya sebagai representasi Barat, Marietja harus merikan diri ke Eropa sebagai wujud kekalahan terhadap pendudukan Jepang. Tokoh-tokoh sebagai representasi Timur digambarkan dapat menembus antara dunia-dunia gaib dan dunia nyata. Ruang-ruang bangsa Timur dapat menunjukkan ruang yang tidak stabil, ruang-ruang yang dapat ditembus sesuka hati sehingga hal ini menyalahi kontruksi ruang yang



mutlak yang ditetapkan oleh Barat. Ruang-ruang yang digambarkan pada novel *Cantik Itu Luka* memporakporandakan konstruksi ruang yang diberikan oleh penjajah. Novel ini menjadi salah satu contoh bahwa ruang pada skala tubuh yang berusaha membaskan diri pada ruang yang mutlak, yaitu ruang yang terbatas. Dewi Ayu dan keturunannya sebagai representasi bangsa Timur membuktikan adanya ruang yang tidak terbatas sebab ia dapat menembus antara dunia gaib dan dunia nyata. Dewi Ayu dapat memilih waktu kematiannya sendiri dan dapat bangkit kembali menuju dunia nyata, sedangkan tubuh yang juga *choric* tergambar pada anak Dewi Ayu yang bernama Cantik, yang tidak memiliki rupa yang jelas.

### Silsilah Dewi Ayu



Eka Kurniawan bukan satu-satunya penulis yang karyanya memiliki unsur kemagisan. Penulis lain seperti Triyanto Triwikromo juga selalu memunculkan kemagisan dalam karyanya. Salah satunya tampak pada karyanya yang disebut kumpulan cerita berjudul *Surga Sungsang*. Kumpulan cerita yang diterbitkan pada tahun 2014 ini menceritakan saudara kembar yang bernama Syekh Muso dan Syekh Bintoro yang memilih untuk tinggal di tempat berlainan. Syekh Muso tinggal di wilayah yang bernama Tanjung Kluwung dan Syekh Bintoro tinggal di Demak. Suatu waktu Syekh Bintoro mengunjungi saudaranya di Tanjung Kluwung, tetapi kunjungan yang dilakukan tidak memiliki maksud baik karena ia berusaha membuat wilayah yang dibangun oleh Syekh Muso menjadi hancur disebabkan perbedaan keyakinan dalam mengajarkan agama Islam. Syekh Muso diceritakan sebagai tokoh yang dapat moksa. Menurut KBBI, moksa berarti tingkat hidup lepas dari ikatan keduniawian atau juga dapat diartikan bebas dari



penjelmaan kembali. Syekh Muso diceritakan sebagai tokoh yang hidup di dasar laut, memilih untuk moksa akibat serangan dari saudaranya sendiri. Syekh Muso dapat menembus dunia nyata dan dunia gaib.

“Azwar, cucu terkasih Syekh Muso, tak menjawab. Namun, ia tahu persis Syekh Muso sesungguhnya telah moksa ke laut. Ia telah berjalan di dasar laut dan melihat ikan-ikan berzikir pada Allah di dinding-dinding laut yang terbelah oleh tongkat Syekh Muso. Ia juga yakin sesaat kemudian Syekh Muso akan berada di perut hiu raksasa dan bercakap-cakap tentang keagungan Allah dengan makhluk-makhluk kecil yang pada suatu malam juga menjadi mangsa monster air itu.” (Triwikromo, 2009, hlm. 21)

Pada saat-saat tertentu Syekh Muso masih dapat kembali ke dunia nyata di Tanjung Kluwung untuk menemui tokoh bernama Zaenab yang bertugas menunggu penanda makamnya. Tokoh Zaenab juga digambarkan sebagai perempuan yang tidak terstruktur, susah dipahami, bahkan aneh karena setiap kata yang diungkapkannya mengandung kontradiksi.

“Lama-lama orang-orang kampung tahu, dunia Zaenab adalah dunia jungkir balik. Jika pada suatu hari Zaenab meminta pisau pada penduduk, maka sebenarnya perempuan bermata pelangi itu mengharap sapu. Jika ia meminta kucing. Sesungguhnya ia meminta anjing. Jika ia bilang hari akan hujan, dapat dipastikan panas terik mengadang. Jika ia bilang seorang akan hidup seribu tahun lagi, sebaiknya orang malang itu segera minta ampun pada Allah, karena tak lama lagi akan sakit keras dan akhirnya mati.” (Triwikromo, 2014, hlm. 49).”

Tanjung Kluwung digambarkan sebagai ruang heterogen yang terlihat dari sikap Syekh Muso dalam pengajaran agama, perilaku Syekh Muso yang dapat menembus ruang nyata dan gaib, serta rakyat yang berada di Tanjung Kluwung yang memiliki banyak keberagaman. Ruang heterogen yang berada di Tanjung Kluwung berusaha digoyahkan oleh Syekh Bintoro hingga keturunannya. Pascamoksa Syekh Muso dan kematian Syekh Bintoro, datanglah tokoh yang bernama Kiai Siti dan Abu Jenar. Kiai Siti adalah keturunan Syekh Muso dan Abu Jenar adalah keturunan Syekh Bintoro. Kedatangan Abu Jenar ke Tanjung Kluwung bersama dengan orang kota bertujuan untuk mengubah Tanjung Kluwung menjadi *resort*. Timur yang diwakilkan oleh Syekh Muso dan Tanjung Kluwung sedangkan Barat direpresentasikan oleh Syekh Bintoro dan keturunannya (serta orang kota) yang ingin menghancurkan Tanjung Kluwung menjadi *resort*. *Resort* adalah hotel yang berada di wilayah pantai. *Resort* adalah budaya bangsa Barat yang dipergunakan sebagai wilayah wisata untuk mengambil keuntungan.

Akhirnya, Tanjung Kluwung sebagai representasi Timur berhasil dihancurkan oleh Teratai Hijau dengan pengeboman. Seluruh warga diceritakan meninggal dunia dan rumah-rumah menjadi hangus. Kehancuran Tanjung Kluwung tidak lantas membuat wilayah Timur menjadi hancur sebab akhir cerita menunjukkan bahwa di Tanjung Kluwung masih terdapat Syekh Muso yang selama ini tidak meninggalkan kampung. Kiai Siti dan anaknya yang bernama Kufah yang juga menjelma menjadi laba-laba. Ada juga Khadijah, perempuan tua yang masih hidup tersisa di Tanjung Kluwung. Moksa menjadi bentuk ketidakstabilan ruang yang dimainkan oleh tokoh Syekh Muso yang tidak mati—



tidak pernah pergi dari kampung. Pernyataan ini juga senada dengan simpulan tesis Rahmawati bahwa strategi alternatif untuk menggoyahkan ruang Syekh Bintoro dapat dilihat salah satunya melalui skala tubuh. Syekh Muso diceritakan sebagai tokoh yang dapat menembus ruang yang terbatas menjadi tidak terbatas, yaitu melalui kegaiban yang diperlihatkan oleh Syekh Muso. Walaupun pada akhir cerita kampung di ujung tanjung telah berhasil dihancurkan oleh Teratai Hijau yang merupakan representasi Barat, novel ini tidak menyetujui wacana kolonial akibat hancurnya tanjung. Pengarang melalui teks *Surga Sungsang* tetap melakukan perlawanan melalui tokoh-tokoh yang berusaha mempertahankan keheterogenan kampung (2017, hlm. 128).

Karya yang akan dibahas pada makalah ini adalah cerpen “Megatruh” karya Danarto. Persoalan yang muncul pada cerpen ini adalah tubuh tokoh utama yang telah bertransformasi, tubuh yang terdiskripsikan, tetapi tidak berbentuk. Tubuhnya tidak tampak dan wujudnya lentur seperti tokoh bernama Zat Asam. Cerpen ini menceritakan persahabatan empat makhluk, yaitu tokoh Aku, Kadal, Pohon Pisang dan Zat Asam. Tokoh aku diceritakan sebagai wujud transparan, sebagai tubuh yang kabur. Selain itu, tokoh Zat Asam diceritakan sebagai cairan, tetapi dapat berbicara.

“Ada suara tanpa rupa,” gumam kami

“Ada rupa bengong melulu,” sahut suara itu. (Danarto, 2004, hlm. 28)

Tokoh dalam cerpen “Megatruh” hanya ide tanpa jasmani yang tampak pada tokoh Zat Asam, sedangkan kejasmanian terlihat pada tokoh Kadal dan Batang Pisang yang merupakan benda yang memiliki pergerakan seperti manusia. Penceritaan cerpen ini sangat sesuai dengan pernyataan Upstone mengenai tubuh yang metafora dan metonimi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Cerpen Danarto memiliki tokoh utama bernama Aku yang diejawantahkan menjadi dua dimensi, yaitu sebagai yang tidak berwujud dan sebagai yang pernah terwujud sebab terjadi pergeseran antara tubuh jasmani dan rohani. Tokoh Aku adalah manusia yang kemudian mati. Terlihat dari petikan teks berikut ini.

“Akhirnya diputuskan untuk menguburkan tubuhku di kampung dengan kereta pagi. Di stasiun pun terjadi kegemparan ketika aku datang. Orang-orang menyibak dan berlari. Ada juga kelompok yang berdekatan. “Jenazah” ku di dalam peti diletakkan dalam gerbong tersendiri. Seseorang dari kakaku dan adikku menunguinya.” (Danarto, 2004, hlm. 34)

Representasi Tuhan digambarkan Danarto melalui tokoh Zat Asam. Zat Asam menjalin pertemanan dengan tokoh Aku, Kadal, dan Batang Pisang. Sebelum kedatangan Zat Asam, persahabatan ketiga tokoh tidak ada masalah. Ketiganya sangat bahagia, tetapi masalah timbul ketika kedatangan Zat Asam. Ketiganya diajak oleh Zat Asam ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh ketiganya, tetapi tiba-tiba jiwa mereka menjadi tansparan atau sudah tidak berbentuk.

“Transparan! teriak kami bersamaan saling raba-meraba tapi tidak sesuatu pun yang terpegang. Tampak tapi tak terjamin. Kosong melompong meskipun ada semburat kontur. Ya, kami telah menjadi sesuatu yang berpijar-pijar. Masing-masing kami undur dan mendekat lagi, mencoba saling pegang tapi tak juga ada yang dapat dipegang. Tiba-tiba terdengar gending yang memenuh sekeliling kami seolah-olah suatu pemantapan kebenaran atas suatu peristiwa.” (2004, hlm. 32)



Meskipun sudah bukan makhluk yang memiliki nyawa, ketiganya masih tetap dapat melihat kejadian-kejadian yang ada di duna nyata. Tokoh Aku dapat melihat dirinya dimakamkan, melihat keluarganya yang bersedih, dan melihat kampung halamannya. Hal ini menandakan bahwa perpindahan antara ruang nyata dan ruang gaib menjadi hal yang tidak asing. Mereka masih dapat kembali ke dunia nyata dan mentransfer dirinya ke dunia gaib. Ruang-ruang yang digambarkan pada cerpen “Megatruh” menjadi ruang yang tidak ada batasnya. Menjadi ruang yang fleksibel untuk ditembus.

Dari ketiga karya di atas, keseluruhannya menampakkan ruang-ruang yang cair, yaitu ruang yang dapat ditembus antara dunia nyata dan dunia gaib. Melalui tokoh-tokoh yang dihadirkan, novel pascakolonial menggambarkan tubuh sebagai target kolonial yang harus dilawan. Kolonialisme selalu berusaha melakukan upaya pengungkungan terhadap tubuh, tetapi hal tersebut ditolak oleh novel-novel pascakolonial bergenre realisme-magis. Eka Kurniawan, Triyanto, dan Danarto menunjukkan bahwa tubuh memiliki kebebasan, bersifat cair, dan tidak stabil. Ketidakstabilan tubuh ditunjukkan dengan kekuatan penulis/sastrawan yang mampu memunculkan tokoh-tokoh yang melakukan transformasi atau perpindahan tubuh. Tubuh digambarkan sebagai bukan tubuh seperti pada novel Eka Kurniawan yang tampak pada tokoh Cantik (seperti ongokan tai).

**Tabel 1 Ketidakstabilan Ruang Tubuh**

Ketidakstabilan Ruang Tubuh			
No	Eka Kurniawan	Triyanto Triwikromo	Danarto
1.	Tokoh Cantik yang tidak berwujud digambarkan seperti ongokan tai	Tokoh Sykeh Muso yang dapat moksa, berpindah dari dunia nyata ke dunia gaib	Tokoh Aku yang berteman dengan Batang Pisang, Kadal, dan Zat Asam
2.	Tokoh Dewi Ayu yang dapat menentukan hari kematiannya	Tokoh Zaenab yang berbicara terbalik	Tokoh Aku yang dapat memasuki dunia nyata walaupun sudah meninggal
3.	Tokoh Dewi Ayu yang dapat bangkit dari kubur	Tokoh Kiai Siti dan Kufah yang dapat berubah wujud menjadi laba-laba.	Zat Asam merupakan representasi dari Tuhan yang menguasai dunia gaib dan nyata, menguasai tokoh Aku, Batang Pisang, dan Kadal.

Bangsa Indonesia adalah bangsa bekas jajahan negara Belanda. Dari ketiga karya sastra yang dijadikan analisis, terbukti bahwa sastra memiliki kontribusi dalam melawan wacana kolonial yang sampai sekarang masih tetap bernaung dalam pikiran bangsa Indonesia. Tanpa disadari, bangsa bekas jajahan terkadang masih memiliki sifat terjajah, yaitu patuh dan tunduk terhadap konstruksi pemberian penjajah. Perlawanan yang dilakukan pada karya-karya pascakolonial memberikan bukti bahwa kekuatan bangsa Indonesia terejawantahkan melalui



resistensi terhadap kecairan ruang, menolak ruang tubuh yang mutlak yang mudah dikontrol, melakukan perlawanan dengan mentransformasi antara ruang nyata dan ruang gaib. Ketidakstabilan ruang menjadi bentuk-bentuk perlawanan terhadap wacana kolonialisme Barat melalui tubuh. Resistensi bangsa Indonesia terhadap wacana kolonial dapat dianggap berhasil. Hal ini secara langsung membuktikan bahwa studi-studi sastra memberikan kontribusi dalam penguatan bangsa Indonesia. Karya yang dihasilkan oleh penulis tidak semata-mata hanya bertujuan menghibur, tetapi sebagai penyebaran ideologi. Salah satunya adalah ideologi pascakolonialisme dalam menolak wacana kolonial.

## **PENUTUP**

Konstruksi ruang tubuh yang ditawarkan oleh Upstone menjadi salah satu strategi dalam melawan kolonial. Tubuh yang dijelaskan oleh Upstone merupakan tubuh yang metonimi, metafora, tidak berwujud, dan cair. Hal ini merupakan resistensi terhadap tubuh kolonial yang digambarkan sebagai sesuatu yang mutlak tidak tergoyahkan. Ketidakstabilan ruang tubuh menjadi wujud resistensi penulis pascakolonial dalam menggoyahkan konstruksi Barat. Tubuh yang dimunculkan penulis pascakolonial adalah tubuh yang *choric*. Hal ini terwujud dari ketiga karya milik Eka Kurniawan, Triyanto Triwikromo, dan Danarto. Eka Kurniawan dan Danarto menggambarkan tubuh yang tidak berbentuk, sedangkan Triyanto Triwikromo menggambarkan tubuh yang moksa dapat menembus dunia nyata dan dunia ghaib. Ketiganya membuat tubuh memiliki keheterogenan, yaitu tubuh yang mampu bertransformasi melalui dunia gaib dan dunia nyata. Karya sastra yang memiliki unsur kemagisan membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu melakukan perlawanan terhadap wacana kolonial. Hal ini juga menandakan bahwa bangsa Indonesia memiliki strategi penguatan budaya bangsa melalui karya sastra dengan cara menolak konstruksi ruang yang diberikan oleh Barat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Danarto. (2004). *Kumpulan Cerpen: Adam Ma'rifat*. Yogyakarta: Matahari.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Gramedia.
- Faruk. (2007). *Belunggu Pasca-Kolonial*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Gandhi, Leela. (2006). *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*. Yogyakarta: Qalam.
- Kadir, Burhan. (2014). *Kadar Realisme Magis dalam Novel Perempuan Poppo Karya Dul Abdul Rahman*. Yogyakarta: UGM
- Kahin, George McTurnal (diterjemahkan oleh Bakdi Soemanto). (1995). *Nationalism and Revolution in Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Kurniawan, Eka. (2002). *Cantik Itu Luka*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Loomba, Ania (Hartono Hadikusumo, penerjemah). (2003). *Kolonialisme/Pascakolonialisme*. Jogjakarta: Benteng Budaya.
- Muhtarom, Imam. (2014). "Realisme Magis dalam Cerpen Kasus Cerpen Gabriel Garcia Marquez, Triyanto Triwikromo, dan A.S Laksana" *Jurnal Poetika Vol. II No.3, Desember 2014*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.



Rahariyoso, Dwi. “Paradoks Ruang Tubuh dalam Puisi Sakramen Karya Joko Pinurbo Kajian Pascakolonial Tubuh Sara Upstone”.

<https://jurnal.ugm.ac.id/poetika/article/view/10413> diakses pada 9 Mei 2017 Pukul 10.23 WIB.

Rahmawati, Risma Nur. (2017). *Aspek Keruangan dalam Surga Sungsang: Analisis Pascakolonial*. Yogyakarta: UGM

Ratna, Nyoman Kuta. (2011). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Said, Edward. (2010). *Orientalisme*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Siswanto. (2010). *Metode Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar

Triwikromo, Triyanto. (2014). *Surga Sungsang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Upstone, Sara. (2009). *Spatial Politics in the Postcolonial Novel*. England: Ashgate Publishing Company.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 2 Kelompok 3**

Pembicara : Risma Nur Rahmawati  
Judul Makalah : “Ketidakstabilan Ruang Tubuh sebagai Strategi Pascakolonial Melalui Karya Sastra”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.00  
Moderator : Agus Sri Danardhana  
Pencatat : Anita Astriawati Ningrum

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Sebagai bagian dari negara yang pernah mengalami okupasi, sisa-sisa ingatan sebagai bangsa yang terjajah masih ada sampai saat ini.
2. Karya sastra melakukan upaya-upaya resistensi pada masa pascakolonial.
3. Bangsa koloni melakukan batas pada ruang bangsa terjajah, tidak lain bertujuan agar mudah dilakukan kontrol. Misalnya, terjadi pada konstruksi strata sosial masyarakat pribumi yang tetap tidak berubah (Kahin, 1955, hlm. 1). Selain itu, hukum di Indonesia juga masih banyak yang terpengaruh oleh bangsa Belanda.
4. Tujuan makalah ini adalah menguraikan strategi bangsa Indonesia dalam melawan konstruksi dari wacana kolonial melalui ruang tubuh. Ruang-ruang yang cair menjadi strategi kultural bangsa Indonesia melalui karya sastra, yaitu novel Eka Kurniawan berjudul *Cantik Itu Luka*, Triyanto Triwikromo dengan kumpulan cerita berjudul *Surga Sungsang*, dan Cerpen Danarto berjudul “Megatruh”.
5. Masa kolonialisme bangsa terjajah adalah masa okupasi yang dilakukan oleh penjajah–bangsa Barat untuk menguasai wilayah geografis dan mengambil kekayaan wilayah koloni untuk kemakmuran bangsanya sendiri. Kemudian, pascakolonialisme tidak berarti sebagai konsep yang datang sesudah kolonialisme, tetapi lebih luas dapat diartikan sebagai penguasaan wilayah yang masuk pada gagasan terhadap wilayah yang pernah dikuasai melalui jejak sebelum mereka meninggalkan wilayah jajahan.
6. Ruang dalam konsep pascakolonial adalah konsep yang lebih filosofis daripada studi lokasi, “*Toward space rather than place, toward a philosophical concept rather than a study of location*” (Upstone, 2009, hlm. 3). Ruang direpresentasikan melalui tempat (*place*), tidak hanya berhenti di titik pengidentifikasian tempat, tetapi melalui tempat, ruang dapat diidentifikasi lebih lanjut.
7. Ruang menurut Upstone terbagi menjadi beberapa level, yaitu bangsa (*nation*), perjalanan (*journey*), kota (*city*), rumah (*home*), dan tubuh (*body*).
8. Menurut Upstone, seorang pengarang berusaha menolak pandangan Barat mengenai tubuh sebagai level terkecil.



## Tanya Jawab

### Penanya 1

Nama : Ramis Rauf

Instansi : Kantor Bahasa Sultra

### Pertanyaan:

Poskolonial menarik. Yang dimaksud dengan tubuh yang cair seperti apa? Berarti ada sesuatu yang membuat *chaos*, mengapa dia bisa *chaos*?

### Jawaban:

Pada level tubuh, Upstone memunculkan istilah *chora*. Secara eksplisit, *chora* adalah identitas cair yang dimiliki oleh tubuh, yaitu sebuah upaya untuk terus-menerus menolak kungkungan atas batasan natural tubuh yang sudah ditentukan oleh kolonial. Menurut Upstone, *chora* adalah tubuh yang *choric*, yaitu dapat ditembus, bukan tubuh, bahkan bentuk yang ditolak. Tubuh yang cair akan merusak tatanan kolonial karena melepaskan ketergantungan pada tubuh yang disetereotipkan oleh penjajah. Tubuh *chora* membedakan dengan tubuh-tubuh yang jasmani sebab ia memasuki alam lain yang kadang tidak dapat dikonstruksi dengan akal pikiran manusia. Inilah yang dimaksud dengan *chaos*.

Misalnya, Syekh Muso, tubuhnya bisa moksa dan berpindah-pindah antara dunia nyata dan dunia gaib. Dewi Ayu bisa kembali dari kematian setelah meninggal.

Tubuh itu menimbulkan kekacauan. Tubuh bisa berubah menjadi hewan. Kekacauan tidak hanya muncul dalam ruang tubuh. Pandangan kolonial, cantik itu tinggi, putih, dan lain-lain. Upstone ingin keluar dari persepsi itu.

### Penanya 2

Nama : Silva Isma

Instansi : UI

### Pertanyaan:

Eka kurniawan senang mengeksplorasi seksualitas. Eka melawan kolonialisme dengan persepsi seksualitas. Bagaimana peran seksualitas dalam teori tentang ruang tubuh?

### Jawaban:

Upstone tidak mengatakan bahwa seksualitas sebagai bentuk resistansi, hanya menjelaskan konsep tentang ruang tubuh sebagai bentuk resistansi terhadap kolonial saja.

### Penanya 3

Nama: La Ode Gusman

### Pertanyaan:

1. Apa relasi antara poskolonial dan realisme-magis?
2. Apa yang menjadi pertimbangan ketika memilih novel dengan latar belakang realisme-magis untuk kajian yang bersandar pada asumsi dasar poskolonialisme?





**Jawaban:**

Upstone menyatakan bahwa novel realisme-magis merupakan salah satu strategi resistansi. Levelnya masih ruang tubuh. Masih ada level *nation* dan lain-lain. Misalnya, suatu bangsa harus multietnik, heterogen, plural, keberagaman atau rumah tidak mesti ruang tamu, ruang keluarga, dan seterusnya.

**Penanya 4**

Nama : Syarif

Instansi : Binjai, Sumatra Utara

**Pertanyaan:**

Apakah kita serta-merta menduga bahwa ketika berusaha mengubah tempat menjadi *resort* merupakan pandangan kolonial? Pikiran di atas tidakkah justru jadi menghambat kemajuan? Ada penanda lain selain *resort*?

**Jawaban:**

Apa pun motifnya, budaya *resort* adalah budaya Barat. Bisnis adalah proyek modernisasi. Modernisasi dekat dengan kapitalisme. Kapitalisme berarti budaya kolonialisme.



## 9. Literasi Folklor: Transmisi Karakter Luhur dalam Sastra Lisan Bugis Makassar

### LITERASI FOLKLOR: TRANSMISI KARAKTER LUHUR DALAM SASTRA LISAN BUGIS MAKASSAR

**Sitti Aida Azis**

HISKI Provinsi Sulawesi Selatan

bunda.ipass@gmail.com

#### **Abstrak**

Folklor merupakan warisan intelektual masa lampau yang sarat nilai pencerahan, moral dan karakter. Nilai tersebut dapat ditunjukkan pada salah satu genre dalam folklor, yaitu sastra lisan, khususnya sastra lisan Bugis Makassar. Sebagai entitas kultural, sastra lisan telah lama tumbuh berkontribusi memberi edukasi mengiringi pertumbuhan peradaban masyarakat Bugis Makassar. Kontribusi besar sastra lisan diperkirakan pada abad X, kemudian mulai menyusut pada era 1980-an. Penyusutan peranan tersebut dirasakan sampai saat ini yang ditandai dengan fakta mutasi karakter manusia Bugis Makassar yang luhur berbudaya menjadi anarkis, koruptif, serta menebar *hoax* dan *bully*, dengan sejumlah masalah lingkungan hidup yang mencengangkan. Dengan demikian, diperlukan transmisi karakter luhur manusia Bugis Makassar dalam warisan sastra lisan yang dimiliki melalui literasi folklor. Transmisi ini merupakan vitalisasi semua genre folklor, khususnya sastra lisan, yang dapat memberikan wawasan ekologis, wawasan kesalehan sosial, wawasan spritual, dan wawasan berkemajuan. Literasi yang dilakukan memanfaatkan kekayaan sastra lisan sebagai instrumen pemugaran karakter luhur manusia Bugis Makassar dalam membangun budaya bangsa.

**Kata-kata kunci:** literasi, folklor, sastra lisan Bugis Makassar

#### **Abstract**

*Folklore is an intellectual heritage of the past which is full of enlightenment, moral and character values. This value can be shown in one genre in a folklore, namely oral literature, especially Bugis Makassar oral literature. As a cultural entity, oral literature has long been contributing to provide education along with the growth of civilization of the Bugis Makassar people. The great contribution of oral literature is thought to be felt in the-10th century and shrink in the 1980s. Depreciation of the role was felt until this time, which is marked by the fact that the mutation of the Bugis Makassar human character is noble to become anarchic, corrupt, spreading hoaxes and bully, with a number of environmental problems. Thus, it is necessary to transmit the noble character of Bugis Makassar human beings in the oral literature inherited through folklore literacy. This transmission is a vitality of all folklore genres, especially oral literature, which can provide ecological insights, social piety insights, spiritual insights, and progressive insights. Literacy carried out to utilize the richness of oral literature as an instrument for restoring the noble character of Bugis Makassar humans in build the national culture.*

**Keywords:** literacy, folklore, Bugis Makassar oral literature



## PENDAHULUAN

Realitas kekinian Indonesia menunjukkan kecenderungan pada keretakan yang dapat merugikan keutuhan bangsa. Hal ini dapat diamati pada ruang-ruang kehidupan berbangsa secara politik, ekonomi, agama, sosial, dan budaya. Keretakan yang dipertontonkan hampir di semua lingkup kehidupan berbangsa tersebut dapat dimaknai sebagai ciri manusia Indonesia modern yang tercabut dari akar budayanya sebagai individu-individu yang harmonis.

Dunia politik nasional saat ini diisi dengan karakter-karakter antagonis yang korup, beberapa penanganan kasus korupsi oleh KPK dapat menunjukkan hal ini. Lapangan kerja yang minim secara ekonomi yang diperparah dengan invasi tenaga kerja asing yang “tidak perlu menguasai bahasa Indonesia” (di tengah upaya kita menjayakan bahasa Indonesia). Viral isu mayoritas dan minoritas, bineka dan antikebinekaan, sampai pada *statement* toleran dan intoleran yang sangat gaduh mewarnai kehidupan berbangsa menunjukkan lemahnya politik kepemimpinan berkarakter, yang tercabut dari akar budaya bangsa.

Konsekuensi lain dari semua krisis tersebut berdampak pada keretakan sendi keharmonisan antaragama dan pilar keterjalinan perbedaan yang lama direkat dalam “Bhinneka Tunggal Ika”. Krisis sosial berwujud kekerasan antarpemuda sampai pada tawuran antarapelajar berseragam, *bully* dan *hoax*, semua ini merupakan akumulasi kecenderungan sikap manusia Indonesia yang justru mengonstruksi transformasi karakter baru yang meyedihkan.

Krisis-krisis tersebut mewabah sampai pada dunia pendidikan, memasuki sekolah-sekolah dengan begitu mudah dan cepat. Beberapa waktu lalu kesadaran publik dikejutkan dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang tua siswa terhadap guru di Kota Makassar dan kekerasan yang dilakukan oleh siswa terhadap guru sampai menyebabkan guru meninggal seperti yang dialami Ahmad Budi Cahyono. Realitas tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dituntut melakukan usaha maksimal dalam memanusiaikan manusia. Salah satu problem serius adalah manusia Indonesia lupa pada akar inti kebudayaannya. Endraswara (2013) mengemukakan bahwa banyak yang telah lupa pada akar dan inti (*culture core*), yang semestinya memakmurkan manusia, tetapi justru menyunat dan bahkan membungkam manusia. Oleh karena sebuah permainan, praktik budaya (*action culture*) makin riuh dengan persaingan tidak sehat. Budaya lebih gampang menjadi milik golongan pengendali. Para pengendali budaya bebas (a) melempar ide, (b) mempermak budaya, dan (c) menyusun skenario budaya, yang ujung-ujungnya budaya sering menjadi kendaraan mereka (hlm. 127).

Mencermati uraian tersebut, media yang dapat digunakan sebagai peluang meminimalkan dampak negatif, salah satunya tersedia dalam folklor yang sarat nilai kearifan. Hal ini terbukti banyak folklor yang bernilai edukatif, bernilai seni, bahkan bernilai sastra tinggi. Setiap folklor kehilangan masa lampaunya, tetapi relatif selalu mampu menjawab masa kini. Folklor bisa kehilangan ruangnya, tetapi nilai luhur di dalamnya terendap, membeku, selalu efektif jika difungsikan kembali untuk merespons masalah-masalah sosial temporer.

Berkaitan dengan kontekstualisasi nilai pada berbagai jenis folklor salah satunya dapat ditunjukkan pada warisan sastra lisan sebagaimana dikemukakan Anwar (2012) bahwa berbagai bentuk sastra lisan, seperti epos, terbukti mempunyai stabilitas yang konkret untuk bertahan selama jangka waktu yang lama.



Sastra lisan, sebagai salah satu jenis folklor, bernilai moral dan karakter. Perkembangan dan tuntutan transformasi pendidikan karakter masa kini menjadikan folklor penting dipelajari dan dibaca kembali melalui agenda-agenda literasi, khususnya pada sastra lisan. Literasi menurut Permatasari (2015), secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Kita mengenalnya dengan melek aksara atau keberaksaraan. Namun, sekarang ini literasi memiliki arti luas sehingga keberaksaraan bukan lagi bermakna tunggal, melainkan mengandung beragam arti [*multi literacies*] (hlm. 148).

Berdasarkan penjelasan tersebut, ciri folklor yang diwariskan turun-temurun secara lisan dapat menemukan penyegaran jika diliterasikan, dalam arti dituliskan dan dibaca, yang dapat menjadi media untuk memugar kualitas moral dan karakter generasi dalam membangun budaya bangsa.

## LANDASAN TEORI

### 1. Hakikat Literasi

Banyak komunitas pegiat keaksaraan mengusung gerakan literasi. Literasi dimaknai sebagai suatu kemampuan baca-tulis yang berkaitan dengan keberaksaraan. Kegiatan-kegiatan literasi telah melampaui maknanya yang sederhana, tidak hanya sekadar baca-tulis, tetapi juga berkesenian dan bermusik. Literasi juga telah menjangkau ruang-ruang teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Permatasari (2015), sekarang ini literasi memiliki arti luas sehingga keberaksaraan bukan lagi bermakna tunggal, melainkan mengandung beragam arti (*multi literacies*). Ada bermacam-macam keberaksaraan atau literasi, misalnya literasi komputer (*computer literacy*), literasi media (*media literacy*), literasi teknologi (*technology literacy*), literasi ekonomi (*economy literacy*), literasi informasi (*information literacy*), bahkan ada literasi moral (*moral literacy*). Jadi, keberaksaraan atau literasi dapat diartikan melek teknologi, melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik (hlm. 148).

Literasi telah mencakup seluruh aspek keterampilan berpikir seseorang dengan menggunakan berbagai sumber pengetahuan. Pandani (2016) mengemukakan bahwa pada abad ke-21 ini, kemampuan disebut sebagai literasi informasi. Selanjutnya, penjabaran komponen literasi informasi, antara lain literasi dasar (*basic literacy*), literasi perpustakaan (*library literacy*), literasi media (*media literacy*), dan literasi teknologi (*technology literacy*).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikemukakan bahwa literasi folklor merupakan kemampuan mengelola informasi yang sarat nilai dalam suatu folklor. Kemampuan mengelola ini menuntut keterampilan dasar hingga pengembangannya ke tahapan yang lebih temporer dengan menggunakan sarana teknologi yang tersedia saat ini untuk membentuk literasi dasar (*basic literacy*) sampai pada tahapan literasi visual (*visual literacy*). Folklor dengan sendirinya dapat ditransformasi mengikuti *trend* perkembangan literasi kekinian yang disesuaikan dengan lingkungan generasi milenial.

### 2. Tinjauan Folklor

Folklor berasal dari bahasa Inggris *folklore*. Kata tersebut merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar, yaitu *folk* dan *lore*. Menurut Dundes (Rafiek, 2012), *folk* adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal



fisik, sosial, dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok lainnya. Namun, yang lebih penting lagi adalah bahwa mereka telah memiliki suatu tradisi, yaitu kebudayaan yang telah mereka warisi turun-temurun, sedikitnya dua generasi yang dapat mereka akui sebagai milik bersamanya. Di samping itu, yang paling penting adalah mereka sadar akan identitas kelompok mereka sendiri. Selanjutnya, Danandjaja dalam Sulistyorini dan Andalas mengemukakan bahwa *lore* adalah sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun dan lisan atau melalui contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu pengingat [*mnemonic device*] (2017, hlm. 2)

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa folklor adalah warisan kebudayaan sekelompok orang dengan ciri-ciri pengenalan fisik, sosial, dan budaya tertentu yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan atau dengan contoh gerak isyarat tertentu sebagai alat pembantu pengingat. Pengertian tersebut juga menunjukkan bahwa kelisanan dan gerak isyarat tertentu dalam praktik budaya sebagai ciri folklor.

Rahayu dan Sudarwati (2016, hlm. 52) mengemukakan bahwa ciri-ciri folklor adalah anonim, berkembang dari versi yang berbeda-beda, dan mewakili suatu kelompok masyarakat tertentu. Fungsi folklor adalah sebagai hiburan dan media penyampaian nilai-nilai sosial serta representasi masyarakat atau proyeksi dari keinginan masyarakat. Selain itu, fungsi folklor lainnya adalah menyebarkan ajaran atau pranata kebudayaan dan alat penguasa untuk memaksakan aturan-aturan masuk dan diterima ke dalam masyarakat.

Folklor memiliki manfaat untuk difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Sulistyorini dan Andalas (2017) mengemukakan bahwa beberapa fungsi folklor, yaitu (a) sebagai hiburan, (b) sebagai alat pendidikan, (c) sebagai kontrol sosial, (d) sebagai pemersatu, dan (e) sebagai pelestarian lingkungan (hlm. 5). Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa folklor merupakan warisan turun-temurun yang dapat menjadi ciri identitas fisik, sosial, dan budaya suatu komunitas kultur. Umumnya, warisan ini bersifat anonim dan memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dalam institusi-institusi pendidikan untuk memberikan pendalaman nilai budaya, pemahaman, dan karakter kepada peserta didik. Konteksnya dengan situasi keindonesiaan masa kini, folklor dapat berfungsi sebagai pencerah dan perekat keragaman yang beberapa tahun terakhir sangat diuji dengan diskursus keretakan yang mencemaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan penjelasan tersebut di atas, Ratna (2011, hlm. 104—105) mengemukakan bahwa folklor lisan dalam hubungan ini disamakan dengan sastra lisan, sedangkan folklor setengah lisan dan nonlisan termasuk tradisi lisan. Dengan demikian, tradisi lisan merupakan wilayah kajian antropologi dan kajian budaya (*cultural studies*), sedangkan sastra lisan merupakan wilayah kajian sastra dan linguistik.

### 3. Sastra Lisan

Sastra lisan merupakan salah satu varian dalam folklor. Lebih spesifik genre sastra lisan mencakup puisi rakyat dalam bentuk pantun, gurindam, dan syair. Selain itu, terdapat prosa rakyat, seperti mitos, legenda, dan dongeng. Teks nyanyian rakyat juga bisa dikategorikan ke dalam sastra lisan karena keanonimannya serta struktur teksnya yang estetik yang menjadi objek kajian



sastra. Waskita dkk (2011, hlm. 1093) mengemukakan bahwa sastra lisan adalah salah satu jenis sastra yang paling lekat dengan masyarakat. Setiap masyarakat hampir memiliki sastra lisannya masing-masing. Keberadaannya di dalam masyarakat sangat penting karena sastra lisan merupakan perbendaharaan nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun. Nilai-nilai yang terkandung dalam sastra lisan ini masih sangat berguna untuk kehidupan sekarang.

Atmazaki (dalam Amin dkk., 2013, hlm. 31) menyatakan bahwa sastra lisan mempunyai banyak fungsi. Dengan sastra lisan, masyarakat purba atau nenek moyang umat manusia mengekspresikan gejolak jiwa dan renungannya tentang kehidupan. Emosi cinta diungkapkan lewat puisi-puisi sentimental. Binatang buas dihadang dan dijinakkan dengan mantra-mantra. Asal-usul nama daerah, hukum adat, dan macam-macam kearifan dicurahkan melalui berbagai mitos, dongeng, tambo, dan riwayat.

#### **4. Karakter Luhur dalam Sastra Lisan**

Berkaitan dengan karakter dan nilai budaya, Marvins (dalam Syarif dkk, 2016, hlm. 19) mengemukakan bahwa karakter bangsa tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya. Budaya didefinisikan sebagai seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku. Membangun budaya bangsa Indonesia dimulai dari daerah, terutama dari penguatan budaya daerah. Penguatan budaya tersebut mencakup semua aspek kebudayaan yang dapat menentukan kualitas manusia Indonesia. Di Sulawesi Selatan peranan tersebut bisa diisi oleh berbagai instrumen budaya daerah yang dimiliki untuk mengasah dan mempersiapkan potensi manusia Bugis Makassar. Karakter luhur yang dimaksud sebagaimana berikut ini.

#### **5. Berwawasan Ekologis**

Istilah *ecocriticism* diciptakan tahun 1978 oleh William Rueckert dalam esainya “Sastra dan Ekologi”. Tahun 1980 muncul sebuah tulisan yang menerapkan *ecocriticism* dalam karya sastra yang berkaitan dengan alam dan masalah lingkungan. Awal tahun 1990-an *ecocriticism* telah banyak dipakai sebagai suatu pendekatan dalam penelitian sastra, khususnya di Amerika. Menurut Garrard (2004), *ecocriticism* meliputi studi tentang hubungan antara manusia dan nonmanusia, sejarah manusia budaya yang berkaitan dengan analisis kritis tentang manusia dan lingkungannya. Di samping itu, *ecocriticism* mengeksplorasi cara-cara manusia membayangkan dan menggambarkan hubungan antara manusia dan lingkungan dalam segala hasil budaya. Dengan begitu, *ecocriticism* dibatasi sebagai studi tentang hubungan antara karya sastra dan lingkungan fisik (Glotfelty dan Fromm, 1996).

Kerusakan lingkungan sebenarnya bersumber pada filosofi atau cara pandang manusia mengenai dirinya, lingkungan atau alam, dan tempatnya dalam keseluruhan ekosistem. Beberapa cara pandang tersebut adalah cara pandang antroposentris, biosentris, dan ekosentris. Kraf (dalam Sadikan, 2016) mengemukakan bahwa antroposentris memandang manusia sebagai penguasa atau pusat dari alam semesta, hanya manusia yang mempunyai nilai, dan isi alam semesta sekadar alat bagi pemuasan.

Biosentris dan ekosentris berpendapat manusia merupakan salah satu entitas di alam semesta. Manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam kehidupan di



alam semesta ini. Kehidupan manusia bergantung dan terkait erat dengan semua kehidupan lain di alam semesta. Manusia dituntut untuk memunyai tanggung jawab moral terhadap semua kehidupan di alam semesta. Semua kehidupan di bumi mempunyai strata moral yang sama. Oleh karena itu, harus dihargai haknya secara sama.

## 6. Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial adalah bentuk perilaku keagamaan seseorang yang lahir dari sikap keagamaan, sementara sikap keagamaan lahir dari pemahaman seseorang atas nilai-nilai yang dipahami (kognitif), dirasakan (afektif), dan dilakukan (konatif). Sebagai perilaku keagamaan, konsepsi Islam lebih dapat menjelaskan tentang kesalehan sosial sebagai bagian dari perbuatan manusia. Hal ini didasari beberapa pemikiran. Pertama, perbuatan manusia banyak didasari atas kehendak dirinya dan tidak bisa semata-mata didasari atas determinan sebagaimana dalam psikoanalisis, sebagai diri yang tidak memiliki kesadaran laksana kapas yang diterbangkan angin seperti dalam *behaviorism*, atau peniruan sebagaimana dikenal dalam teori *modelling*. Kedua, salah satu karakteristik manusia adalah memiliki kesadaran untuk selalu introspeksi, berdialog dengan dirinya sendiri, dan selalu berhubungan dengan lingkungan alam fisik. Manusia selalu berinteraksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian. Sejak awal telah dijelaskan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang dalam unsur penciptaannya terdapat ruh Ilahi. Kesalehan sosial adalah bagian dari interaksi seseorang dengan pengalaman kerohaniannya. Ketiga, sebagai makhluk berkesadaran, perilaku manusia didasari pilihan dan putusan rasional sehingga perilaku manusia seharusnya bisa terlepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Seorang yang saleh akan tetap saleh meski lingkungan sekitarnya banyak terjadi kriminalitas, korupsi, dan kejahatan lainnya (Wahab, 2015).

## 7. Kesalehan Spritual

Kesalehan berasal dari kata *saleh* yang dirangkai dengan awalan *ke-* dan akhiran *-an* yang berarti hal keadaan yang berkenaan dengan saleh. Kata *saleh* berasal dari bahasa Arab yang berarti baik. Beramal saleh berarti bekerja dengan pekerjaan yang baik. Kata *sosial* berasal dari kata *society*, jadi *sosial* berarti bermasyarakat. Dengan demikian, kesalehan sosial berarti kebaikan dalam kerangka hidup bermasyarakat. Artinya dalam konteks Bugis Makassar adalah penanaman *sirik* atau harga diri (Moein, 1990). Makna *pacce* dapat diartikan sebagai rasa simpati, yang dalam konsep masyarakat Bugis-Makassar bermakna rasa atau perasaan empati terhadap sesama dan seluruh anggota komunitas yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Andaya (2004) mengemukakan bahwa *pace* merupakan bentuk aktualisasi diri yang dicanangkan kepada manusia sebagai makhluk otonom untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Adapun bentuk pengabdian atau penghambaan dapat diinterpretasikan berbagai hal, bisa dalam konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi, asalkan mampu mempertanggungjawabkannya secara sikap (*responsibility-accountability*).

Dengan begitu, kontkes kesalehan spiritual dimulai dengan penanaman etika, akhlak yang membuahkan *sirik* sebagai falsafah Bugis Makassar yang harus dilestarikan sebagaimana Islam mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab



(akuntabilitas), dari tanggung jawab individual hingga tanggung jawab kolektif. Kepemimpinan yang bersifat kolektif seperti jabatan tertentu, itu merupakan sebuah mobilisasi vertikal setiap orang, dalam bahasa fikihnya disebut *fardhu kifayah* (Ghufron, 2012).

## 8. Karakter Berkemajuan

Karakter berkemajuan dalam perspektif Bugis Makassar salah satunya adalah keberanian menjalani hidup. Keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu dengan tidak terlalu merisaukan kemungkinan-kemungkinan buruk. Aristoteles, dikutip oleh Indra (2010), menyatakan bahwa orang yang mempunyai keberanian akan mampu bertindak bijaksana tanpa dibayangi ketakutan-ketakutan yang sebenarnya merupakan halusinasi belaka. Orang-orang yang mempunyai keberanian akan sanggup menghidupkan mimpi-mimpi dan mengubah kehidupan pribadi sekaligus orang-orang di sekitarnya.

Irons (2013) mengatakan bahwa keberanian adalah suatu tindakan memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting dan mampu menghadapi segala sesuatu yang dapat menghalanginya karena percaya kebenarannya. Findley (1995) juga mengungkapkan bahwa keberanian adalah suatu sifat mempertahankan dan memperjuangkan apa yang dianggap benar dengan menghadapi segala bentuk bahaya, kesulitan, dan kesakitan. Hidup tanpa keberanian adalah hidup yang sia-sia. Hidup dan keberanian ibarat tubuh dan bayang-bayang. Kemana pun kita pergi dia selalu mengikuti. Hidup ini begitu penuh pilihan, maka beranilah memilih. Apa pun pilihan yang kita ambil selama berpijak dari pemahaman tentang hidup yang utuh tak akan menjadi pilihan yang salah. Keberanian adalah sebuah iman. Ketika kita mendengar, melihat, dan berbicara dengan hati kita, apa pun tindakan, pikiran, dan ekspresi yang kita lakukan bukan keberanian lagi namanya. Ia sudah menjadi iman yang hidup.

## PEMBAHASAN

Merevitalisasi kandungan folklor dalam pembahasan ini dilakukan dengan literasi untuk membaca kembali nilai-nilai luhur di dalamnya. Dengan begitu, terlihat nilai esensial sastra lisan Bugis Makassar yang dapat membentuk karakter positif generasi bangsa dalam membangun budaya Indonesia, yaitu sebagai berikut.

### 1. Transmisi Karakter Berwawasan Ekologis

Sastra lisan Bugis Makassar dapat berfungsi secara ekologis untuk menghindarkan lingkungan alam dan manusia dari krisis. Fungsi ekologis yang dimiliki sastra Bugis Makassar dapat merevitalisasi lingkungan dan menjaga keseimbangan perilaku manusia. Misalnya, dengan mentransmisikan nasihat luhur tentang hubungan manusia dengan alam telah disampaikan melalui *pappasang* sebagai berikut.

*Tallui passalak namanjari lamung-lamunga; sekremi, punna malabusuk karaenga siangang tumakbicaraya; maka ruanna, punna makkasipalli karengan siangang tumakbicaraa; makallunna, punna assekre ati tumappakrasanganga.*

Ada tiga hal yang menyebabkan tanaman (pertanian) berhasil dengan baik. Pertama, apabila raja atau penguasa dan para penegak hukumnya





bertindak adil dan jujur; kedua, jika raja atau penguasa dan para penegak hukumnya berpantang melakukan tindakan yang tercela; ketiga, apabila seluruh rakyat bersatu padu (dalam memecahkan setiap masalah)` [PPSKM dalam Hakim, 1999, hlm. 327—328)

Kutipan tersebut merupakan jenis sastra lisan Makassar. Nasihat tersebut menunjukkan keterkaitan antara alam dan manusia. Baik atau buruk alam sangat ditentukan oleh perbuatan manusia. *Lamung-lamunga* `tumbuhan` menjadi representasi alam secara keseluruhan: tanaman pertanian, hutan, dan komponen alam lainnya. Selain *pappaseng*, anak-anak bisa ditanamkan karakter berwawasan ekologis dengan menggunakan sastra lisan Bugis Makassar lainnya seperti cerita rakyat atau *rupama* yang dibukukan oleh Kulle dan Tika (2003), yang mengusung karakter-karakter cerita lingkungan hidup, antara lain 1) cerita *Pung Dare Dare Na Pung Kura* tentang monyet dan kura-kura, 2) cerita *Daeng Naranggong* tentang setan dan bangau hitam, serta 3) cerita *Pung Jonga-Jonga Na Pung Siso* tentang seekor rusa dan keong. Cerita rakyat tersebut dapat berfungsi menstimulasi imajinasi anak tentang pengenalan lingkungan hidup. Anak-anak juga akan memahami sifat-sifat baik yang harus mereka terima dan mengenali sifat buruk yang harus mereka jauhi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa membuat diri menjadi literat dengan sastra lisan merupakan aktivitas mengedukasi diri dengan nilai-nilai luhur tentang gagasan dan sikap di dalam sastra lisan yang dapat dijadikan standar moral hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan alam. Edukasi yang berlangsung akan mentransmisikan karakter luhur sikap, gagasan, atau tindakan menjaga alam.

## 2. Transmisi Karakter Kesalehan Sosial

Sastra lisan Bugis Makassar memiliki kekuatan untuk melakukan pencegahan seperti ketidakharmonisan, kemiskinan, korupsi, pembegalan yang menghilangkan nyawa, perceraian, dan narkoba dengan menanamkan nilai-nilai sosial kejujuran. Nilai-nilai sosial tersebut dapat diserap dari sastra lisan *pappaseng*.

*Isengi keknang, maknassa antu nikanayya lambusuk tallui rupanna. Makasserenna, malambusuk ri Allahu Taala, iami nikana malambusuk ri Allah Taala tangkalupaia. Makaruana, malambusuka riparangna tau, iami nikaya malambusuk riparanna tau tangkaerokia sarena paranna tau. Makatalluna, malambusuka ri batang kalenna, iami nikana malambusuka ri batangkalenna, angkalitutumui bawana ri kana balle-ballea.* `Sesungguhnya kejujuran itu ada tiga macam. Pertama, kejujuran kepada Allah Swt., yakni dengan mematuhi perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya. Kedua, jujur kepada manusia, yakni tidak mengharapkan imbalan dari manusia. Ketiga, jujur kepada diri sendiri, yakni dengan senantiasa menjaga dan mengawasi mulut dari perkataan dusta` (Saleh, 2006, hlm. 171)

Pesan tersebut merupakan pesan nilai tentang makna kejujuran yang sangat universal. Seseorang yang tertanam rasa kejujurannya kepada Allah Swt. akan hidup dengan harmonis dengan saling mengasihi (bersedekah). Namun, kejujuran kepada manusia dan diri sendiri menegaskan bahwa manusia saling membutuhkan dengan kepantasan menjaga etika tutur kata dalam interaksi.



Selain *passeng/passang*, karakter sosial lainnya dalam sastra lisan Bugis Makassar dapat pula diserap dari pesan-pesan kearifan dalam cerita lisan berbentuk prosa seperti *paupau* atau kadang juga disebut *paupau ri kadong*. Menurut Yusuf (2015, hlm. 5), *paupau ri kadong* merupakan tradisi lisan masyarakat suku Bugis yang perlu dilestarikan untuk mengenal dan memahami alam pikiran, perasaan, dan sikap hidup.

### 3. Transmisi Karakter Kesalehan Spritual

Sastra lisan Bugis Makassar dapat mentransmisikan karakter kesalehan spritual. Transmisi spritualitas dapat dilihat pada berbagai pesan-pesan dalam *pappasang* sebagai berikut.

*Ia iannamo tau alakkaki sirika siagang mallako, maknassa tanjari taumi antu.*

‘Barang siapa meninggalkan *sirik* dan takwa kepada Tuhan, pada hakikatnya orang demikian itu bukanlah manusia lagi.’ (Saleh, 2006, hlm. 174)

Nilai malu dan takwa kepada Tuhan merupakan integrasi yang saling mencerminkan satu sama lain. Manusia Bugis Makassar yang punya rasa malu tentu mencerminkan takwanya kepada Tuhan. Sebaliknya, seorang manusia Bugis Makassar yang menjunjung ketakwaannya akan memiliki rasa malu, dalam istilah Bugis Makassar disebut *sirik*, untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Saleh (2006, hlm.174) mengemukakan bahwa secara harfiah kata *sirik* berarti malu dan dapat juga berarti kehormatan, harga diri, atau martabat seorang manusia. *Pacce* bermakna pedih dan perih yang dirasakan meresap ke dalam kalbu seseorang karena melihat penderitaan orang lain. Oleh karena itu, selain sebagai wujud rasa solidaritas, *pacce* ini juga berfungsi sebagai alat menggalang persatuan, kebersamaan, bahkan menjadi motivasi untuk berusaha walaupun dalam kondisi memprihatinkan. Krisis sosial di lingkungan manusia Bugis Makassar dapat dicegah dengan warisan budaya yang terendap dalam sastra lisan.

Hilangnya nilai malu (*sirik*) dalam diri akan menghilangkan keistimewaan manusia Bugis Makassar sebagai manusia. Dengan demikian, kutipan teks *pappasang* tersebut berperan besar dalam menentukan nilai kualitas spritualitas manusia yang bersendikan agama Islam dengan menekankan arti penting ketakwaan kepada Allah Swt. Transmisi karakter spritualitas semacam ini penting untuk mencegah penyimpangan dan korupsi yang dilakukan oleh manusia Bugis Makassar. Orang yang korupsi tidak memiliki rasis malu dan ketakwaan kepada Tuhannya. Menggunakan *pappasang* tersebut sebagai media transmisi edukasi akan membentuk rasa malu dan takwa bagi anak-anak Bugis Makassar secara dini.

### 4. Transmisi Karakter Berkemajuan

Sastra lisan Bugis Makassar dapat mentransmisi karakter berkemajuan. Hal ini telah terbukti sejak lama bahwa manusia Bugis Makassar memiliki keinginan dan etos kerja. Nilai-nilai sosial dan spritual yang terjaga menstimulasi etos kerja yang tinggi. Sikap jujur dan percaya menjadi modal penting orang Bugis Makassar berniaga dengan orang lain. Manusia Bugis Makassar adalah perantau yang dahulu bertekad sukses di tanah rantau yang mereka tuju sebagai suatu tuntutan untuk meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut telah lama



terinternalisasi sebagai sebuah karakter karena pulang ke kampung halaman tanpa kesuksesan berarti malu (*sirik*).

Karakter pantang pulang sebelum meraih kemajuan dan kesuksesan ini dibentuk melalui kultur yang erat kaitannya dengan *pappasang* Makassar yang terkenal, yaitu *kualleangi tallanga natowalia* `sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai` atau dengan maksud sebenarnya `lebih kupilih tenggelam di lautan daripada harus kembali (ke pantai)`. Petuah tersebut dalam lingkungan Makassar adalah *bajikangngaingi tallanga notowalia* (Jahril dkk., 2015) dengan substansi makna yang sama seperti diucapkan dalam bahasa Bugis.

Dengan begitu, teks sastra lisan tersebut berperan memberikan motivasi, menumbuhkan imajinasi ke tujuan, dan menjaga motivasi yang terpatri dalam diri manusia Bugis Makassar untuk meraih kesuksesan. Fakta sosial menunjukkan bahwa orang Bugis Makassar merupakan perantau yang sukses di banyak daerah di Indonesia (bahkan dunia Internasional) sebagai pebisnis, akademisi, politisi, diplomat, dan sejarawan. Kesuksesan itu tidak bisa dilepaskan dari pedoman nilai luhur kultur Bugis Makassar.

## **PENUTUP**

Entitas Bugis Makassar sebagai dua etnik berkerabat memiliki warisan folklor yang kaya dengan nilai-nilai karakter luhur. Hal ini dapat ditunjukkan dengan satu genre folklore, yaitu sastra lisan Bugis Makassar. Sastra lisan Bugis Makassar telah berperan sejak lama. Peranannya mengantarkan manusia Bugis Makassar mencapai kejayaan peradaban yang maju sejak abad X. Peranan sastra lisan Bugis Makassar saat ini kehilangan panggung, faktanya dapat ditunjukkan pada ketidakseimbangan perilaku manusia Bugis Makassar yang menyimpang tidak hanya pada tradisi budayanya yang luhur. Mencermati hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa merevitalisasi peranan sastra lisan Bugis Makassar merupakan hal yang penting dan mendesak.

Literasi sebagai agenda kontemporer dapat mengembalikan peranan tersebut sehingga manusia Bugis Makassar kembali dalam iklim kulturnya yang luhur. Melalui literasi, sastra lisan Bugis Makassar direvitalisasi. Peranan nilainya dapat berfungsi melalui transmisi berkesinambungan jika dijadikan media yang menstimulasi imajinasi dan karakter anak-anak dan generasi muda. Tidak hanya itu, para pelaku bisnis, politisi, akademisi, dan lainnya pun dapat belajar dari nilai-nilai kearifan di dalamnya.

Salah satu media transmisi sastra lisan (begitu juga dengan genre folklor yang lain) adalah kelisanan dan tindakan isyarat sebagai pengingat. Saat ini, di tengah kemajuan informasi dan teknologi sastra lisan bisa ditransmisi melalui banyak cara. Transmisi sastra lisan dapat dilakukan secara teknologis. Misalnya, cerita rakyat bisa disampaikan melalui visual animasi, film, cakram dongeng, dan cakram musik rakyat. Sastra lisan dan jenis folklor lainnya bisa menjangkau anak-anak di sekolah dan mahasiswa-mahasiswa di kampus melalui drama, teater, dan permainan rakyat. Sastra lisan juga penting dibawa kembali ke rumah untuk menjadi pengantar tidur bagi anak-anak dan pencerahan bagi orang tua. Agenda literasi ini akan menjadi jalan pencarian dan pencerahan bagi manusia Indonesia dalam membangun budaya bangsa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Leonard Y. (2004). *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*, terj. Nurhadi Simorok, Inninawa, Makassar.
- Amin, Irzal, dkk. (2013). "Cerita Rakyat Penamaan Desa di Kerinci: Kategori dan Fungsi Sosial Teks". *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajaran*, Volume 1 Nomor 1, Februari 2013.
- Anwar, Ahyar. (2012). "Peran Kontemporer Sastra Lisan Sulawesi Selatan dan Kaitannya dengan Hilangnya Sistem Transmisi Karakter Lokal". Makalah Ilmiah pada Kongres Internasional II Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Selatan. Diakses di <https://ahyaranwar.wordpress.com/2012/10/06/> pada tanggal 8 April 2018.
- Danandjaya, James. (1984). *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Grafitipers.
- Endraswara, Suwardi. (2013). *Metodologi Penelitian Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Findley, Paul. (1995). *Mereka Berani Bicara*. Bandung: Mizan.
- Ghufron. (2012). Islam antara Kesalahan Spritual dan Sosial. Sabtu, 12 Agustus 2018 dalam <http://amanahru.blogspot.com>
- Garrard, Greg. (2004). *Ecocriticism*. London and New York: Routledge.
- Glotfelty, Cheryll dan Harold Fromm. (1996). *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ekology*. Athens, Georgia: University of Georgia Press
- Moein, Andi MG.(1990). *Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis-Makassar dan Siri'na Pacce*, Yayasan Mapress, Makassar.
- Hakim, Zainuddin. (1999). *Nilai Edukatif Pappasang Makassar* dalam Bunga Rampai Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra III. Makassar: Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Makassar.
- Irons, Peter. (2003). *Keberanian Mereka yang Berpendirian*. Bandung: Angkasa.
- Jahril, Andi Sahtiana dkk. (2015). "Pappasang Makassar". Artikel, diakses di [http://andisahtianij.blogspot.co.id/2015/08/pappasang-makassar\\_21.html](http://andisahtianij.blogspot.co.id/2015/08/pappasang-makassar_21.html) pada tanggal 8 April 2018.
- Kulle, Syafruddin dan Tika, Zainuddin. (2003). *Rupama*. Gowa: Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.
- Pandani. (2016). "Konsep Literasi dan Komponennya". Artikel, Diakses di <http://pak.pandani.web.id/2016/07/konsep-literasi-dan-komponenya.html>, pada tanggal 8 April 2018.
- Permatasari, Ane. (2015). "Membangun Kualitas Bangsa dengan Budaya Literasi". Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB 2015.
- Rafiek, M. (2015). *Teori Sastra: Kajian Teori dan Praktek*. Bandung: Refika Aditama.
- Ratna, Nyoman Kutha. (2011). *Antropologi Sastra. Peranan Unsur-Unsur Kebudayaan dalam Proses Kreatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahayu, Anik Cahyaning dan Sudarwati. (2016). "Nilai Moral dalam Folklor sebagai Media Revolusi Mental Generasi Masa Depan". *Jurnal Parafrase*, Vol. 16 No.02 Oktober 2016.
- Sadikan Setya Yuwana. (2016). *Ekologi Sastra*. Lamongan: Pustaka Ilalang Group.



- Saleh, Nur Alam. (2006). *Pappasang Turiolo* (Revitalisasi Nilai-nilai Budaya dalam Kehidupan Orang Makassar). *Jurnal Walasuji*, Vol. I, No. 1, Januari-Maret 2006.
- Sulistiyorini, Dwi dan Andalas, E.F. (2017). *Sastra Lisan: Kajian Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Malang: Madani.
- Syarif, Erman dkk. (2016). “Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar dalam Proses Pembelajaran sebagai Salah Satu Strategi Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”. *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, Vol. 1 No. 1 April 2016, ISSN 2503 – 1201.
- Waskita, Dana dkk. (2011). “Sastra Lisan sebagai Kekuatan Kultural dalam Pengembangan Strategi Pertahanan Nasional di Pelabuhan Ratu Jawa Barat”. *Jurnal Sositologi Edisi 23 Tahun 10*, Agustus 2011.
- Wahab. (2015). *Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan DiklatPuslitbang Kehidupan Keagamaan
- Yusuf, Nurdin dkk. (2015). *Paupau Ri Kadong: Suatu Tradisi Lisan Sulawesi Selatan*. Makassar: Pustaka Refleksi.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Dr. Sitti Aida Azis, M.Pd.  
Judul Makalah : “Literasi Folklor: Transmisi Karakter Luhur dalam Sastra Lisan Bugis Makassar”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 13.45—15.15  
Moderator : Dra. Yanti Riswara, M.Hum.  
Pencatat : 1. Elvi Suzanti  
          2. Inayatushshalihah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Sastra Bugis Makassar kaya dengan karakter *pacce na sirik*.
2. Sastra Bugis Makassar berkarakteristik etos kerja.
3. Karakter positif yang terkandung dalam folklor tradisi lisan Bugis Makassar antara lain adalah karakter berwawasan ekologis, karakter kesalehan sosial, karakter kesalehan spiritual, dan karakter berkemajuan.
4. Peranan nilai folklor dapat berfungsi melalui transmisi berkesinambungan untuk menstimulasi imajinasi dan karakter anak-anak dan generasi muda.
5. Salah satu media transmisi sastra lisan adalah kelisanan dan gerakan isyarat sebagai penguat. Selain itu, hal tersebut dapat juga ditransmisikan melalui perangkat teknologi, misalnya dalam bentuk animasi visual, film, dan cakram padat (berisi dongeng dan musik rakyat).

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Sutejo  
Instansi : Balai Bahasa Jawa Barat

**Pertanyaan:**

Folklor banyak mengandung nilai-nilai yang layak untuk dikembangkan. Akan tetapi, masyarakat kurang peduli dengan nilai-nilai itu, padahal nilai-nilai yang terkandung dalam folklor sangat baik jika ditransmisikan kepada anak-anak. Oleh karena itu, nilai-nilai folklor perlu diunggah ke dunia maya untuk menarik perhatian anak-anak muda.

**Jawaban:**

Saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Untuk menarik perhatian anak-anak, folklor perlu dialihwahanakan, seperti dongeng-dongeng yang dapat diunduh dari internet. Anak-anak sering mengunduh dongeng yang mereka sukai dari internet.

**Penanya 2**

Nama : Mahmudah  
Instansi : Unhas

**Pertanyaan:**

1. Tulisan ini dapat menjadi sumbangan yang besar bagi penanaman sikap yang berasal dari sastra lisan Bugis dengan menggunakan bahasa Indonesia, yaitu dalam menanamkan karakter kesalehan. Mungkin lebih menarik jika yang diunggah adalah cerita yang beraksara Bugis, bukan Latin.
2. Bagaimana strategi literasi folklor? Apakah ditulis dengan huruf Latin atau huruf Lontara?
3. Pendefinisian cerita rakyat perlu dilakukan. Jenis cerita seperti apa yang disebut folklor?

**Jawaban:**

1. Banyak cara menyampaikan nilai-nilai karakter kesalehan. Misalnya, untuk anak sekolah dasar, karakter kesalehan dapat disampaikan melalui lagu, sedangkan untuk remaja, karakter itu dapat disampaikan melalui cerita, seperti kisah cinta Husain.
2. Dalam tulisan ini, pembicara tidak berfokus pada penulisan folklor dengan huruf/aksara tertentu, tetapi lebih memfokuskan nilai-nilai karakter yang terdapat dalam folklor.
3. Folklor biasanya didefinisikan sebagai cerita yang hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak diketahui pengarangnya, dan tidak bersifat kekinian. Oleh karena itu, folklor tidak dapat dimodernkan karena karya sastra hidup sesuai dengan zamannya. Sastra itu bukan ilmu, melainkan seni karena dalam sastra semua perasaan keluar.

**Penanya 3**

Nama : M. Fadli Muslimin

Instansi : UGM

**Pertanyaan:**

Bagaimana cara mementaskan sastra lisan tersebut di masyarakat sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terserap oleh masyarakat? Bagaimana konteks sastra lisan Bugis ini jika dikaitkan dengan hubungan manusia dan alam? Bagaimana konteks sosiohistoris lahirnya sastra lisan ini?

**Jawaban:**

Penyampaian sastra lisan harus melihat konteks, misalnya, di sanggar-sanggar yang ada di sekolah.

**Isu-Isu Penting:**

1. Nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam folklor perlu dikenalkan kepada generasi muda dengan media baru, seperti internet, yang dapat menarik minat dan perhatian generasi muda.
2. Folklor harus bernuansa global sehingga dapat dipahami oleh berbagai kalangan.
3. Persentase pelajaran sastra harus diperbanyak dalam pelajaran bahasa Indonesia.



## H. SUBTEMA 8: BAHASA DAN SASTRA UNTUK STRATEGI DAN DIPLOMASI

### 1. Bahasa dan Sastra untuk Strategi dan Diplomasi

Judul : Bahasa dan Sastra untuk Strategi dan Diplomasi  
Pembicara : Sutan Adil Hendra  
Jabatan : Wakil Ketua Komisi X DPR RI  
Hari, Tanggal : Minggu, 28 Oktober 2018  
Pukul : 19.40—21.00  
Moderator : Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S.

Terima kasih, Pak Gufran. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Bahasa, Profesor Dadang, beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati sebagai kebanggaan kita, tokoh nasional dan sastrawan kita, Pak Ahmad Tohari. Apresiasi untuk pembicara dan seluruh rekan-rekan yang hadir sebagai peserta di dalam seminar ini. Syukur Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. Pada tanggal 28 Oktober tahun ini kita merayakan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara melalui bahasa Indonesia. Sejalan dengan hal itu, malam ini saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPR, khususnya Komisi X, dan kepada Badan Bahasa yang telah menyelenggarakan Kongres Bahasa dan Sastra, yang pada kesempatan kali ini temanya adalah Bahasa dan Sastra untuk Strategi dan Diplomasi. Bagi saya tema tersebut sangat menarik.

Saya awali pemaparan saya dari dua kutub yang tadi disampaikan oleh Pak Gufran bahwa orang cerdas selalu mencari solusi untuk setiap masalah. Mudah-mudahan pemaparan saya membawa solusi bagi masa depan bahasa yang kita cintai. “Adat hidup orang bertuah, kepada orang baik sangka, adat hidup orang terhormat, berbaik sangka jadi amalan, adat hidup orang pilihan, berbaik sangka dalam pergaulan”. Ungkapan yang saya sampaikan sebagai pembuka tersebut adalah bagian kecil dari pantun adat Melayu. Sebagaimana tema yang saya amanatkan malam ini, yaitu bahasa dan sastra untuk strategi dan diplomasi, pantun adat tersebut adalah contoh bahwa bahasa tidak hanya terangkai dengan indah, tetapi juga terkandung kedalaman makna di dalamnya sehingga menjadi ikatan dalam pergaulan masyarakat. KBI XI yang diselenggarakan kali ini dan resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bertepatan dengan 90 tahun peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Momentum ini sangat bersejarah bagi kita karena kita dapat mengingat kembali perjalanan Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh pemuda dari berbagai penjuru negeri hampir seabad yang silam. Substansi ikrar yang sungguh sangat visioner ini memiliki tiga butir makna yang luar biasa. Butir pertama adalah “Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia”. Butir kedua adalah “Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia”. Sementara itu, butir yang ketiga sangat erat kaitannya dengan tema kita pada hari ini, yaitu “Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jika kita melihat sejarah terbentuknya bahasa Indonesia, KBI Kedua pada tahun 1954 di Medan menghasilkan putusan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman





dahulu sudah diperkenalkan dan dipergunakan sebagai bahasa penghubung antarpulau di nusantara ini. Sejalan dengan hal itu, pernyataan “menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia” telah dipahami sebagai pengakuan untuk menempatkan bahasa Indonesia lebih tinggi daripada bahasa daerah yang hanya digunakan untuk berkomunikasi antardaerah, baik dalam bentuk bahasa lisan maupun tulis. Bahasa Indonesia sebagai simbol negara memiliki keunikan jika dibandingkan dengan simbol negara yang lain. Misalnya saja apabila kita bandingkan dengan bendera yang juga merupakan simbol negara, bendera merupakan simbol yang berjarak dengan pemiliknya, sedangkan bahasa Indonesia tidak memiliki jarak dengan penggunanya. Di mana pun kita berada, bahasa melekat dengan kita. Tentunya sumber daya manusia Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan kebahasaan. Justru karena itu, informasi menjadi suatu kunci pokok dalam keberhasilan membangun dan menerjemahkan semua ordinas yang kita lakukan. Oleh karena itu, fokus kita adalah membuat bahasa *booming* dan menjadi sesuatu yang kita banggakan di tingkat nasional dan tingkat internasional.

Bahasa dan sastra Indonesia memiliki peran, baik secara strategis maupun diplomatis. Jika kita melihat dari peran strategis yang menunjukkan cara berpikir keindonesiaan dan cara pandang kebinekaan, bahasa Indonesia setara dengan bahasa lain karena fungsi bahasa Indonesia dan unsur sastranya sejajar dengan bahasa dan sastra internasional. Jika kita lihat dari peran diplomasi, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk bekerja sama dalam konteks internasional. Diplomasi tersebut dapat bertujuan untuk menyebarkan bahasa Indonesia ke dunia global. Beberapa akses yang bisa kita lihat sebagai contoh adalah keharusan tenaga kerja asing untuk menguasai bahasa Indonesia dan mengikuti Uji Kemahiran Bahasa Indonesia sebagai syarat utama bekerja di Indonesia.

Selanjutnya adalah tentang pengajaran bahasa Indonesia bagi bangsa asing. Jika kita perhatikan, kita sering menggunakan bahasa asing dalam forum-forum internasional, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri. Kita juga sering menerjemahkan karya sastra Indonesia ke dalam bahasa asing dan juga karya sastra asing ke dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, pemanfaatan bahasa Indonesia dalam sastra sebagai ilmu strategi kebangsaan perlu dikembangkan dan diterapkan dalam bentuk diplomasi dengan wawasan kebinekaan yang lebih luas guna menjadikan bahasa dan sastra Indonesia secara internasional setara dengan bahasa dan sastra negara-negara maju lainnya. Dengan demikian, peran strategi dan diplomasi bahasa dan sastra Indonesia adalah untuk memperkuat keberadaan negara Indonesia dan sekaligus meningkatkan daya saing bangsa Indonesia yang kita cintai ini.

Era globalisasi membawa konsekuensi bagi bangsa Indonesia yang harus berintegrasi dengan bangsa lain dengan membentuk interaksi antarbangsa, seperti kita ketahui perlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam forum ini saya mengajak kita semua agar bisa memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Bahasa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi bahasa utama di Asia Tenggara. Jika kita lihat kronologinya, suku Melayu adalah suku yang mendiami wilayah paling luas di Asia Tenggara. Tentu kita tahu mengetahui bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ini tentu tugas berat Badan Bahasa untuk membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa



ASEAN. Potensi lain dari bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional adalah saat ini bahasa Indonesia dipelajari di lebih dari 45 negara, di antaranya, Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, Italia, dan China. Beberapa perguruan tinggi terkemuka di China bahkan membuka program studi bahasa dan sastra Indonesia. Banggalah kita sebagai bangsa Indonesia!

Sesuatu yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia saat World of Manage menempatkan bahasa Indonesia pada peringkat delapan besar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Namun, dengan potensi yang besar tersebut, ternyata kondisi sosiologi bangsa Indonesia saat ini menunjukkan beberapa kendala yang menghambat bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Persoalan pertama ialah maraknya perilaku bahasa yang negatif. Bahasa Indonesia sering disalahgunakan dalam ujaran kebencian, perundungan SARA, dan penyebaran berita bohong. Ini menjadi tantangan bagi kita menjadi sesuatu yang harus kita cari solusinya secara dini. Persoalan kedua adalah hilangnya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Kita lebih senang berbahasa asing. Kita bisa lihat contohnya dari sebagian masyarakat Indonesia yang sangat berlebihan mengagumi bahasa asing dan memandang rendah terhadap bahasa sendiri. Hal itu tampak dan bisa kita lihat di mana-mana bahwa bahasa asing lebih banyak digunakan di ruang publik, misalnya di perumahan, pusat perbelanjaan, hotel-hotel, dan nama-nama instansi pendidikan, yang tertulis dalam bahasa asing tanpa diawali dengan tulisan bahasa Indonesia. Kita harus mengambil langkah untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat untuk mencintai bahasa sendiri, lalu bisa berbangga terhadap bahasa Indonesia. Persoalan ketiga adalah rendahnya langkah politis untuk menjadikan bahasa Indonesia tuan rumah di negeri sendiri, khususnya keharusan memakai bahasa Indonesia dalam forum internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Bahkan, beberapa pertemuan formal yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia justru malah menggunakan bahasa asing. Hal itu tentu melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Sejalan dengan hal itu, literasi bangsa yang masih rendah juga mengakibatkan bahasa Indonesia belum menjadi bahasa resmi, baik secara ilmiah maupun diplomatis dalam mendukung ekonomi kita. Pengetahuan kebahasaan pun masih tergolong rendah, seperti penggunaan kata sehari-hari yang tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Generasi muda sekarang lebih senang menggunakan, misalnya kata *mikrofon* dibandingkan dengan *pelantang*. Contoh lain adalah penggunaan kata *selfie* yang padahal kita tahu itu bukanlah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari kata *selfie* adalah swafoto. Melalui KBI ini marilah kita mulai mencintai bahasa kita agar bahasa kita mempunyai derajat yang tinggi. Kondisi sosiologis di atas memerlukan penanganan yang serius oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui pembangunan strategis dan diplomatis kebahasaan. Namun, bukan hanya Badan Bahasa, melainkan sebenarnya hal itu adalah tanggung jawab kita semua, terutama kami di Komisi X DPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional, Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, karena bahasa adalah kebanggaan kita.

Tentu permasalahan kebahasaan menjadi tantangan kita semua, bukan hanya bagi Kepala Badan Bahasa, melainkan juga kita semua sebagai masyarakat. Kita



bisa memulai bersama-sama dengan melakukan pembenahan terhadap kebijakan-kebijakan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia sehingga sebelum menjadi bahasa internasional, bahasa Indonesia dapat dimuliakan terlebih dahulu oleh bangsanya sendiri. Tentu saja melalui pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam ranah publik. Setuju? Saya, selaku Kepala Komisi X, sudah menyampaikan secara legislatif kepada anggota DPR, khususnya di Komisi X yang membidangi pendidikan mitra, bahwa kami akan berusaha mengatasi masalah-masalah yang saya sampaikan di atas. Kami telah menerbitkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Nasional. Undang-undang tersebut memiliki aturan buku 3M, yaitu mutu, murah, merata. Kami berharap, Badan Bahasa dapat menjadi *leading sector*. Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan, penyediaan buku teks selama dua belas tahun akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah akan melaksanakan pendistribusiannya. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengatur penguatan budaya bangsa, termasuk budaya membaca, agar kemampuan berliterasi bahasa masyarakat meningkat. Sangat menyedihkan memang saat kita mendengar bahwa tingkat literasi Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei oleh UNESCO. Hal itu sungguh sangat menyedihkan. Bangsa yang sebesar ini berada hanya satu tingkat di atas suatu negara kecil di Amerika Latin, yaitu Botswana. Bayangkan kapan kemampuan berliterasi bangsa yang besar ini akan meningkat. Agama Islam bahkan telah mewariskan “*iqra, iqra, iqra*” atau ‘bacalah, bacalah, bacalah’. Mudah-mudahan semangat Sumpah Pemuda melalui seminar bahasa ini dapat menular kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi. Saya yakin, jika Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan dan tentang Pemajuan Kebudayaan bisa segera kami sahkan, Undang-Undang tersebut akan menjadi fondasi yang kuat dan meningkatkan mutu pendidikan kita.

Adanya keterkaitan antara perkembangan bahasa dan sastra yang kuat dan budaya literasi suatu bangsa yang lemah, perlu ditunjang dengan undang-undang. Undang-Undang tersebut menjamin bahasa dan sastra Indonesia dalam industri perbukuan. Jadi, kita membuat sebuah payung agar ke depan industri pencetakan buku diselenggarakan demi kepentingan bahasa dan negara. Semuanya ada dalam pasal yang terkandung dalam Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan, terutama bahwa buku itu harus bermutu, murah, dan merata. Dalam perkembangan diplomasi kebahasaan bagi bangsa Indonesia yang sangat besar ini, sebenarnya DPR telah memberikan salah satu strateginya melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dengan demikian, tentu bangsa Indonesia telah memiliki simbol kedaulatan dan kehormatan negara. DPR juga berperan untuk mengganti implementasi undang-undang tersebut melalui fungsi pengawasan, khususnya dalam pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya, saya berharap pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan dapat membuat bangsa Indonesia memperoleh kehormatannya di dunia. Saya yakin dalam masa-masa kita dihadapkan pada persaingan dunia global ini, saya mengusulkan. Mudah-mudahan kita dapat saling mendukung, terutama untuk membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi PBB. Momentum tersebut tidak akan terulang. Sebagai bangsa yang besar, kita harus memiliki mimpi yang besar. Melalui KBI XI ini



marilah kita menggiatkan kembali bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan bangsa dan bahasa pergaulan di tingkat internasional. Tidak akan ada yang dapat mengubah nasib kita kecuali kita sendiri. Berbagai tantangan dapat kita taklukkan kalau kita bersama memuliakan kembali bahasa kita sehingga bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa persatuan dan menjadi bahasa pergaulan internasional. Itulah beberapa pengantar yang dapat saya sampaikan. Akan tetapi, sebelum saya menutup pemaparan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa buah pantun karena pantun juga sudah didaftarkan menjadi warisan budaya UNESCO.

Potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi pada pasar bebas ASEAN sungguh luar biasa. Kita harus berbahasa dengan baik dan benar apabila kita ingin agar bahasa Indonesia digunakan oleh masyarakat internasional. Kongres Bahasa Indonesia XI ini merupakan ajang yang bergengsi, terutama untuk memajukan budaya agar lebih mandiri. Agar bahasa dan sastra dapat menjadi alat strategi dan diplomasi, kita menjadikan bahasa Indonesia tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih. Semoga Allah Swt. memberikan kekuatan bagi kita untuk mengamalkan apa yang menjadi amanat Sumpah Pemuda. *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M.  
Judul Makalah: “Bahasa dan Sastra untuk Strategi dan Diplomasi”  
Hari, Tanggal : Minggu, 28 Oktober 2018  
Pukul : 19.40—21.00  
Moderator : Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S.  
Pencatat : 1. Azhari Dasman  
2. Kunkun Purwati  
3. Nadia Almira Sagitta

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Bahasa dan sastra memberikan peran secara strategis dan diplomatis.
2. Secara strategis, bahasa menunjukkan cara berpikir dan cara pandang kebinekaan bahwa bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain.
3. Secara diplomatis, bahasa merupakan sarana untuk bekerja sama dalam konteks internasional sehingga dapat digunakan untuk menyebarkan bahasa Indonesia ke dunia global.
4. Kita mengharuskan TKA untuk belajar bahasa Indonesia sebagai prasyarat utama bekerja di Indonesia.
5. Penerjemah karya sastra, baik dari bahasa Indonesia ke bahasa asing maupun bahasa asing ke bahasa Indonesia, diperlukan agar sastra Indonesia dapat bersaing dengan sastra asing.
6. Peran strategi dan diplomasi dapat memperkuat keberadaan negara Indonesia dan sekaligus meningkatkan daya saing bangsa Indonesia yang kita cintai.
7. Pada era globalisasi ini kita perlu membentuk integrasi antarbangsa, seperti MEA.
8. Kita memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN karena Indonesia memiliki peluang yang sangat besar. Dari segi kronologis, suku Melayu termasuk suku yang besar di Asia Tenggara. Kita ketahui bahwa mulanya bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia digunakan dalam pergaulan dan menempati kedudukan lebih tinggi daripada bahasa daerah karena bahasa Indonesia menghubungkan komunikasi antarpulau dan antarsuku di nusantara.
9. Tugas Badan Bahasa adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN.
10. Potensi lain dari bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah saat ini bahasa Indonesia dipelajari di 45 negara. Beberapa universitas di Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, Italia, dan Cina bahkan membuka prodi bahasa dan sastra Indonesia.
11. Menurut World Almanac, bahasa Indonesia masuk peringkat 8 besar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia.
12. Walaupun jumlah penggunanya di dunia cukup besar, ada kondisi sosiologis Indonesia yang dapat menghambat bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kondisi tersebut, antara lain, disebabkan oleh maraknya



- perilaku bahasa yang negatif, misalnya penyalahgunaan dalam ujaran kebencian, penyinggungan SARA, dan penyebaran kabar bohong.
13. Selain itu, menguaknya karakter xenofilia juga dapat menyebabkan hilangnya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia.
  14. Kemauan politik yang rendah untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dapat mengancam keberadaan bahasa Indonesia. Ancaman tersebut muncul karena adanya kecenderungan untuk lebih senang menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing di ruang publik, seperti hotel, pusat perbelanjaan, dan nama institusi pendidikan, saat ini makin marak. Selain itu, pertemuan formal harusnya menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
  15. Sebelum bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, terlebih dahulu bahasa Indonesia harus dimuliakan oleh bangsanya sendiri melalui penggunaan yang baik dan benar di dalam masyarakat.
  16. Komisi X sedang menyusun
    - a) UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Nasional yang mengusung 3M, yaitu mutu, murah, merata. Setelah itu, akan terbentuk Badan Bahasa dan Perbukuan Nasional. Ke depan, industri pencetakan buku akan diatur oleh undang-undang sehingga tidak lagi seenaknya sendiri, demi kepentingan bangsa dan negara. Buku ajar siswa wajib belajar 12 tahun menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menerima dan menyebarkan.
    - b) UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengatur penguatan budaya bangsa, termasuk membaca, agar literasi bahasa kita meningkat. Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei dalam hal literasi bangsa.
  17. Agar bahasa Indonesia memperoleh kehormatan dunia, Pak Sutan Adil mengusulkan gagasan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi PBB tahun 2045.

## **Tanya Jawab**

### **Penanya 1**

Nama : Abdurrahman Rahim

Instansi : Makassar

### **Pertanyaan:**

Mengenai cita-cita bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di PBB, saya optimis, tetapi juga pesimis. Kalau ada upaya untuk ke sana, sekarang TKA menyerbu Indonesia secara besar-besaran. Mengapa TKA begitu mudah mencari pekerjaan, sedangkan kita kesusahan? Sebaiknya, perlu ditetapkan UU bagi TKA agar menggunakan bahasa Indonesia.

### **Jawaban:**

Ada Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatakan bahwa perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing wajib memfasilitasi TKA untuk mengikuti tes bahasa Indonesia.



### **Penanya 2**

Nama : Budianto  
Instansi : DKI Jakarta

#### **Pertanyaan:**

Untuk menamatkan pendidikan, perguruan tinggi mensyaratkan TOEFL, dan begitu juga halnya dengan seleksi beasiswa. Mungkin hal itu bisa dijadikan pertimbangan bagi Komisi X untuk meringankan prasyarat tersebut apabila menempuh pendidikan di negeri sendiri dan mencari beasiswa dari negeri sendiri.

#### **Jawaban:**

Komisi X juga bermitra dengan Kemenristekdikti. Pak Sutan menolak impor dosen dengan alasan meningkatkan kompetensi dosen Indonesia lebih penting. Saat ini sedang dilakukan sinkronisasi UU tentang Dosen agar menjadi langkah kemudahan untuk memenuhi kompetensi legalitas kependidikannya. Komisi X tidak dapat melarang persyaratan TOEFL di perguruan tinggi karena TOEFL sangat berkaitan dengan jurnal internasional. Akan tetapi, ini akan menjadi PR bagi Komisi X.

### **Penanya 3**

Nama : Munira Hasjim  
Instansi : Unhas Makassar

#### **Tanggapan:**

Bunyi salah satu pasal dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 adalah bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum internasional ketika penyelenggara memperkenalkan bahasa Indonesia. Kenyataannya, ketika kami membuat makalah berbahasa Indonesia untuk diseminarkan di ajang internasional, pihak universitas menolak. Ini bertentangan dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 itu.

### **Penanya 4**

Nama : Yani Paryono  
Instansi : -

#### **Pertanyaan:**

1. Kalau kita perhatikan, guru bahasa Indonesia menghadapi sistem yang memprihatinkan. Menurut saya itu adalah masalah keteladanan para pejabat publik. Kepala sekolah unggulan alergi menulis dengan bahasa Indonesia. Saya berharap, Komisi X akan membahas UKBI bagi pejabat publik. Para pejabat publik hampir 85% bersikap positif terhadap bahasa negara, tetapi realitasnya mereka tidak bisa meninggalkan bahasa asing ketika berkomunikasi. Tolong jadikan salah satu alat komunikasi dan keteladanan untuk berbahasa yang baik dan benar.
2. Saya juga gelisah karena peraturan mengenai TKA yang awalnya wajib berbahasa Indonesia malah dihapus.



**Jawaban:**

Ada Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatakan bahwa perusahaan yang memperkerjakan pekerja asing wajib memfasilitasi TKA untuk mengikuti tes bahasa Indonesia.

**Isu-Isu Penting:**

1. Bahasa Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadi bahasa internasional, sekurang-kurangnya menjadi bahasa ASEAN.
2. UU tentang Perbukuan dan tentang Pemajuan Kebudayaan sangat penting untuk memajukan literasi.
3. Pejabat publik harus diuji kemampuan berbahasanya karena mereka adalah teladan masyarakat.
4. Bangsa Indonesia harus memuliakan bahasa Indonesia. Sebelum bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, terlebih dahulu bahasa Indonesia harus dimuliakan oleh bangsanya sendiri melalui penggunaannya yang baik dan benar di dalam masyarakat.
5. Bangsa Indonesia mengusahakan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi PBB tahun 2045.





## 2. Memajukan Bahasa, Memajukan Budaya MEMAJUKAN BAHASA, MEMAJUKAN BUDAYA

Hilmar Farid  
Direktur Jenderal Kebudayaan  
hilmarfarid@gmail.com

### Abstrak

Pengelolaan bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai sejak masa kolonial di awal abad ke-20 dan terus berjalan hingga hari ini. Semula pengelolaan bahasa dijalankan untuk kepentingan administrasi kolonial. Semenjak kemerdekaan, disusunlah kebijakan pengelolaan bahasa yang memperkuat identitas nasional. Bahasa memainkan peranan penting dalam membentuk kesadaran kebangsaan. Akan tetapi, bahasa nasional juga tidak dapat hidup sendiri terpisah dari praktik hidup masyarakat dengan keanekaragaman budayanya. Ekspresi budaya masyarakat menjadi sumber inspirasi dari kekayaan bahasa daerah yang pada akhirnya turut mendorong pengembangan bahasa nasional. Karena itu, pemajuan kebudayaan adalah prasyarat dari pengembangan bahasa. Sastra memegang peranan penting dalam konteks itu, yaitu sebagai penghela pemajuan bahasa.

**Kata-kata kunci:** politik bahasa, struktur perasaan, imajinasi kebangsaan, pemajuan kebudayaan, kanon sastra

### Abstract

*The management of Indonesian language has a long history, begun in the colonial period at the beginning of the 20th century and continuing to this day. Initially language management was carried out in the interests of the colonial administration. Since independence, language management policies have been developed that strengthen national identity. Language plays an important role in shaping national consciousness. However, national languages also cannot live alone apart from the living practices of people with cultural diversity. The expression of community culture is a source of inspiration for the richness of regional languages which in turn contributes to the development of national languages. Therefore, the promotion of culture is a prerequisite for language development. Literature plays an important role in that context, i.e. as an advocate for the advancement of language.*

**Keywords:** language politics, feeling structure, national imagination, cultural advancement, literary canon

### PENDAHULUAN

Awal September ini merebaklah perbincangan publik yang cukup ramai di media sosial mengenai gejala berbahasa kaum muda di wilayah Jakarta Selatan. Gejala berbahasa tersebut dipengaruhi oleh bahasa Inggris yang kemudian menyebar luas lewat berbagai ekspresi budaya pop. Tindak tutur kaum muda tersebut dinilai “keminggiris” oleh sebagian kalangan: mencampurkan fraseologi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara kacau dalam tiap-tiap kalimat. Mereka mengganti kata ‘yang’ dengan *which is*, ‘bahkan’ dengan *even*, ‘sejujurnya’ dengan *to be honest* dan mencampurnya dengan kosakata bahasa Indonesia



sehingga menghasilkan kalimat seperti: “*To be honest*, sejujurnya gua selama ini tahu *even* dia enggak pernah bilang. *Which is* sebenarnya *literally* gw kek *have feel...*”<sup>1</sup>. Wacana publik tentangnya terbelah: sebagian mengkritik gejala itu karena tidak sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sedangkan sebagian lain menganggapnya sebagai gejala kebudayaan yang wajar. Diskusi tentang sikap-sikap yang semestinya diambil dalam rangka pembinaan bahasa pun kembali menyedot perhatian publik.

Gejala berbahasa campuran Indonesia-Inggris di kalangan anak muda bukanlah hal baru. Gejala ini bisa dilacak asal-muasalnya sejak maraknya globalisasi pada dekade 1980-an. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi meningkatkan keterpaparan kaum muda kita pada beragam ekspresi budaya di dunia. Salah satunya yang paling mengemuka ialah segenap produk budaya populer yang dihantarkan melalui wahana bahasa Inggris, seperti musik pop dan film Hollywood. Dari situlah bahasa Inggris merasuk ke dalam percakapan budaya sehari-hari anak muda perkotaan. Hasilnya adalah sebuah budaya hibrida yang dibentuk oleh percampuran dari berbagai budaya di dunia. Bersamaan dengan itu juga muncul gaya berbahasa hibrida yang bentuk terkini dapat kita amati dalam gaya berbahasa kaum muda Jakarta Selatan.

Dari sini dapat dilihat betapa berkait-kelindannya gejala bahasa dan gejala budaya. Pilihan orang dalam berbahasa dalam banyak hal dikondisikan oleh cara hidup dan pola interaksinya dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan kata lain, gejala bahasa pada akhirnya mesti dilihat sebagai suatu gejala kebudayaan. Sikap kita terhadap keberagaman pilihan berbahasa masyarakat seyogianya mempertimbangkan pula berbagai interaksi antarbudaya yang hidup di masyarakat. Keberagaman bahasa merupakan cerminan dari keberagaman budaya. Persoalannya adalah bagaimana mengintegrasikan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa ke dalam strategi besar pengelolaan kebudayaan nasional.

Keberagaman bahasa tentu merupakan hal yang patut disyukuri. Akan tetapi, apabila tidak dikelola dengan baik, keberagaman bahasa dapat berujung pada ketiadaan pemahaman bersama yang merupakan syarat penting bagi integrasi nasional. Dengan demikian, kita dihadapkan pada sebuah dilema: di satu sisi, kita perlu menyuburkan keberagaman bahasa yang merupakan cerminan kekayaan budaya dan sumber inspirasi bagi bahasa nasional, tetapi di sisi lain, kita tetap memerlukan konsolidasi bahasa nasional sebagai satu-satunya platform bersama untuk berbicara sebagai bagian dari satu bangsa.

Dilihat dari perspektif itu, mengemuka sejumlah persoalan. Sejauh mana bahasa nasional mesti dikembangkan dan dibina dalam kaitannya dengan bahasa daerah dan bahasa asing? Pola hubungan seperti apakah yang terjadi antara kebiasaan berbahasa dan keseluruhan budaya yang hidup di masyarakat? Ke arah manakah dan melalui cara macam apakah pengelolaan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan pertimbangan kebudayaan mesti dilangsungkan?

Lewat makalah ini, penulis hendak memeriksa (1) sejarah hubungan antara praktik berbahasa dan kesadaran kebangsaan, (2) peran bahasa daerah dan budaya tradisi dalam pengembangan bahasa Indonesia, (3) kerangka pemajuan kebudayaan dalam konteks pengelolaan bahasa Indonesia serta (4) bagaimana kesusastraan dapat menjadi penghela upaya pemajuan tersebut.

---

<sup>1</sup> <https://tirto.id/bahasa-ala-anak-jaksel-dikritik-ivan-lanin-dibela-budayawan-betawi-cXpt> (diakses pada 21 September 2018)



## LANDASAN TEORI

Dalam makalah ini penulis menggunakan pendekatan kajian budaya (*cultural studies*). Secara lebih khusus, teori Raymond Williams tentang kebudayaan sebagai “struktur perasaan” (*structure of feeling*) serta “analisis irama” (*rhythmanalysis*) Henri Lefebvre akan menjadi pintu masuk untuk menganalisis hubungan antara budaya, bangsa, dan bahasa.

Williams memilah tiga kategori umum yang merangkai semua wacana tentang kebudayaan (Williams, 1965: 57), yaitu *pertama*, pengertian ideal yang menempatkan kebudayaan sebagai himpunan norma yang mengorientasikan cara hidup masyarakat; *kedua*, pengertian deskriptif yang menempatkan kebudayaan sebagai keseluruhan pikiran dan imajinasi masyarakat; dan *ketiga*, pengertian sosial yang menempatkan kebudayaan sebagai keseluruhan cara hidup masyarakat yang tecermin tidak hanya dalam buah pikiran dan imajinasi, tetapi juga dalam pranata dan perilaku sehari-hari. Dalam analisis kebudayaan yang berimbang, ketiga pengertian tersebut mesti dipertimbangkan bersama-sama tanpa mengabaikan salah satu dari ketiganya.

Ketika kebudayaan dilihat sebagai kesatuan dari orientasi normatif, buah pikiran dan imajinasi, sekaligus praktik hidup masyarakat, apa yang kita peroleh adalah gambaran tentang “struktur perasaan” (*structure of feeling*) masyarakat. Konsep ini dirumuskan Williams untuk menggambarkan kecenderungan umum suatu masyarakat dalam merasakan situasi di sekitarnya dan mengartikulasikan perasaan tersebut ke dalam sikap tertentu.<sup>2</sup> Struktur perasaan inilah yang mengikat keberagaman praktik dalam sebuah masyarakat menjadi sebuah keseluruhan yang terpahami bersama.

Struktur perasaan dibentuk oleh praktik hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Pola hubungan sosial (*ensemble of social relations*) yang mengemuka secara sistematis meninggalkan jejak pada benak setiap anggota masyarakat. Jejak itu berupa struktur rujukan tersirat yang ada dalam benak setiap anggota masyarakat—suatu sistem rujukan bersama—dalam mengalami, merasai, dan menanggapi situasi konkret yang mengemuka. Karena berfungsi memberikan perspektif dalam menandai dan memaknai kenyataan, Williams menyebut struktur tersebut sebagai hal yang oleh karenanya komunikasi dalam masyarakat dimungkinkan. Dalam arti itu, struktur perasaan dapat dikatakan mendahului tindak komunikasi verbal.

Karena dibentuk oleh praktik hidup dan hubungan sosial aktual dalam masyarakat, struktur perasaan tidak dapat serta-merta diajarkan secara formal. Struktur perasaan tidak mengenal kurikulum dan silabus. Setiap perubahan pola hubungan sosial mendorong pula perubahan struktur perasaan masyarakat.<sup>3</sup> Setiap

---

<sup>2</sup> “The term I would suggest to describe it is structure of feeling: it is as firm and definite as 'structure' suggests, yet it operates in the most delicate and least tangible parts of our activity. In one sense, this structure of feeling is the culture of a period: it is the particular living result of all the elements in the general organization.” (Williams, 1965: 64)

<sup>3</sup> “One generation may train its successor, with reasonable success, in the social character or the general cultural pattern, but the new generation will have its own structure of feeling, which will not appear to have come 'from' anywhere. For here, most distinctly, the changing organization is enacted in the organism: the new generation responds in its own ways to the unique world it is inheriting, taking up many continuities, that can be traced, and reproducing many aspects of the organization, which can be separately described, yet feeling its whole life in certain ways differently, and shaping its creative response into a new structure of feeling.” (Williams, 1965: 65)



perubahan besar dalam struktur perasaan menghasilkan kesenjangan antara satu kelompok budaya dan kelompok budaya lainnya. Contohnya adalah kesenjangan budaya antargenerasi dalam satu masyarakat yang sama. Secara lahiriah, perubahan struktur pengalaman ini tampak pada pergeseran bentuk dan fungsi dari berbagai artefak budaya, mulai dari seni, busana, hingga bahasa.

Perubahan struktur pengalaman dapat terjadi secara drastis dan menghasilkan dampak yang masif. Perubahan itu berakar pada perubahan irama hidup masyarakat. Di sini pendekatan *rhythmanalysis* Henri Lefebvre (2004) dipakai untuk memperkuat perspektif Williams. Yang dimaksud dengan “irama” (*rhythm*) di sini adalah cara hidup masyarakat dan pola hubungan sosial yang dilihat dalam kaitannya dengan daur hidup. Irama masyarakat agraris yang distruktur oleh waktu tanam, waktu panen, dan waktu senggang di antara keduanya, yakni ketika segala kehidupan artistik masyarakat disalurkan untuk merefleksikan keseluruhan daur hidup tersebut. Hal ini sangat berbeda dari irama masyarakat perkotaan yang distruktur oleh waktu enam hari kerja dan akhir pekan.

Masyarakat modern, menurut Lefebvre, hidup dalam keserentakan antarberbagai irama hidup, sebuah keadaan yang ia sebut *poliritmia* (Lefebvre, 2004: 67). Berbagai kelompok dari beragam latar tradisi menjalani irama hidup bersama di kota. Apabila keberagaman irama hidup ini saling berbenturan, muncul keadaan yang disebut *aritmia*. Konflik yang timbul akibat pengerasan identitas primordial (entah itu ras, etnis, atau agama), umpamanya, disebabkan karena aritmia antara irama produksi dan reproduksi sosial yang berakar dari praktik budaya tradisi, di satu sisi, dan irama kehidupan modern yang didorong oleh tuntutan pada akumulasi kekayaan. Akibatnya, mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik yang semula sudah ada dalam irama kehidupan sosial berbasis tradisi akhirnya justru lenyap ketika irama tersebut ditundukkan pada irama hidup modern yang serba mengejar keuntungan pribadi. Benturan antarirama kehidupan sosial inilah yang mendorong lahirnya struktur perasaan yang baru di masyarakat: cara baru dalam mengalami, memaknai, dan menanggapi kenyataan di sekitar.

Dalam ranah kebahasaan, perubahan struktur perasaan kerap kali mengejawantah dalam pergeseran makna kata-kata. Hal ini tercermin dalam perubahan kosakata (*vocabulary*). Williams memperlihatkan bagaimana proses pembentukan makna kata dalam bahasa Inggris sangat dipengaruhi oleh lika-liku perkembangan masyarakat (Williams, 1960; Williams, 1983). Kata *art* dalam bahasa Inggris, misalnya, diartikan semula sebagai ‘keahlian’ dan baru belakangan, seiring dengan Revolusi Industri, dimaknai sebagai ‘seni’ dalam kontrasnya terhadap ‘kerajinan’ (*craft*) yang merupakan hasil industri. Terlihat bagaimana perubahan makna kata dilatari oleh perubahan struktur perasaan atau sensibilitas yang pada akhirnya dapat diasalkan pada pergeseran pola hubungan sosial.

Kebudayaan, dalam perspektif Williams, dapat diartikan sebagai ‘totalitas struktur perasaan masyarakat, baik yang tersimpan dalam benak maupun yang mengejawantah dalam berbagai ekspresi tindakan. Bahasa adalah salah satu ekspresi tersebut.



## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah kajian kepustakaan yang berfokus pada dokumen-dokumen peraturan perundangan dan kajian historis tentang kebijakan terkait bahasa dan kebudayaan. Dokumen yang dikaji dalam makalah ini berkaitan dengan peraturan perundangan, sebagian besar, adalah dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah disusun oleh 120 kabupaten/kota se-Indonesia. Dokumen perencanaan kebudayaan berbasis data yang disusun oleh para pemangku kepentingan di masyarakat dan disahkan melalui keputusan bupati/walikota itu adalah sumber informasi yang sangat kaya. Di dalamnya terpetakan berbagai aspek budaya tradisi dan modern, termasuk di dalamnya keadaan aktual bahasa yang digunakan di kabupaten/kota.

## PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Bangsa sebagai Sejarah Bahasa

Sejak pertama kali dilontarkan oleh Soewardi Soerjaningrat pada Kongres Pendidikan Kolonial Pertama di Den Haag, pada 28—30 Agustus 1916, usulan tentang perlunya pengelolaan “bahasa pergaulan” di Indonesia terus diperdebatkan hingga kini. Apabila pada masa sebelum kemerdekaan wacana seputar itu mengerucut pada pengakuan atas bahasa Indonesia sebagai “bahasa pergaulan”, selepas kemerdekaan wacana itu berkembang ke dalam diskusi tentang sejauh mana bahasa Indonesia dapat dan harus dikelola. Pada bagian ini akan dikupas bagaimana pembentukan bahasa Indonesia turut mendorong perluasan kesadaran kebangsaan kita.

Bahasa Indonesia berakar pada bahasa Melayu. Mula-mula berfungsi sebagai bahasa di antara para saudagar yang menyambangi bandar-bandar besar di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan, bahasa Melayu berkembang menjadi platform komunikasi antarkelompok budaya di nusantara ketika mereka keluar dari lingkungan berbahasa ibunya dan bertemu dengan kelompok budaya lain. Perkembangan ini ditopang oleh industri penerbitan buku dan surat kabar, yang semula digerakkan oleh golongan Eropa atau peranakan Eropa, kemudian sejak paruh kedua abad ke-19 diisi pula oleh golongan peranakan Tionghoa (Toer, 2003: 15).

Dalam sejarah pengarusutamaan bahasa Melayu itu, Lie Kim Hok (1853—1912) biasanya dianggap sebagai Bapak Bahasa Melayu karena ia menerbitkan buku tata bahasa berjudul *Melajoe Betawi, Kitab dari Hal Perkataan-Perkataan Melajoe, Hal memetjah Oedjar-Oedjar dan Hal Pernahkan Tanda-Tanda Batja dan Hoeroef Besar* (1884). Ia juga disebut sebagai penulis novel Melayu modern pertama dengan terbitnya *Bintang Toedjoeh* pada tahun 1886 (Salmon, 2010: 151). Proses penyebarluasan bahasa Melayu tersebut menjadi makin masif berkat maraknya penerbitan surat kabar *Bumiputera* yang untuk pertama kalinya dipelopori oleh R.M. Tirta Adhisoerjo pada tahun 1906 dengan koran *Medan Prijaji*.

Karena berasal dari kepentingan praktis dalam melakukan perdagangan, bahasa Melayu yang berkembang di bandar-bandar nusantara jauh dari konsistensi apalagi keseragaman. Upaya untuk membakukan suatu model bahasa Melayu dijalankan oleh aparaturnya kolonial yang dimulai dengan pemberlakuan sistem ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 lewat penerbitan *Kitab Logat Melajoe*, dilanjutkan dengan penerbitan *Komisi untuk Bacaan Rakyat (Commisie voor de*



*Volkslectuur*) pada tahun 1908 yang kemudian menjadi penerbit Balai Poestaka pada tahun 1917. Tugas dan fungsi Balai Poestaka sebagai lembaga kolonial adalah menerbitkan “bacaan sehat” (mendukung misi kolonial di Hindia Belanda) dalam bahasa Belanda, Melayu, Jawa, Sunda atau Madura (Samuel, 2008: 146). Dalam kasus bahasa Melayu, pemerintah kolonial hendak mengarus-utamakan bahasa Melayu Riau yang dianggap sebagai Melayu tinggi, berbeda dari Melayu *lingua franca* yang mereka hina sebagai Melayu kacau (*brabbel Maleisch*).

Kendati demikian, bahasa Melayu *lingua franca* beredar luas di kalangan pergerakan kebangsaan pada awal abad ke-20. Bahasa Melayu pasar ini bercorak egaliter dalam penggunaannya, tidak mengenal jenjang bahasa seperti dalam bahasa Jawa, juga tidak mengenal etiket pemakaian yang baku dan sopan seperti dalam bahasa Melayu tinggi yang didesakkan pemerintah kolonial.<sup>4</sup> Egalitarianisme dalam gaya berbahasa Melayu pasar inilah yang mendorong sebagian besar penggunanya merasa menjadi satu bagian dari komunitas tidak kasat mata yang mereka bayangkan sebagai Indonesia. Para penggunanya seperti berdiri sama tinggi pada sebuah platform imajiner tempat mereka merasa ikut ambil bagian di dalamnya.

Interaksi antarbudaya, surat kabar, dan bahasa Melayu pasar—inilah modal dasar dari terbentuknya identitas kebangsaan Indonesia. Benedict Anderson dengan tepat menempatkan kebangsaan sebagai “artefak kebudayaan” (Anderson, 2006: 4). Kebangsaan merupakan hasil dari proses kebudayaan bersama antarkelompok budaya yang berbeda melalui bahasa dan sarana penyebarluasannya, yakni mesin cetak dan surat kabar. Lewat sarana itu, berbagai masyarakat di Hindia Belanda merasa memiliki imajinasi kebangsaan yang sama sebagai bangsa Indonesia.

Lewat penggunaan bahasa Melayu pasar yang tersebar luas hingga dekade 1920-an melalui surat kabar dan pertemuan-pertemuan kaum pergerakan, terbentuklah struktur perasaan baru yang berorientasi pada pergerakan massa dan persatuan kebangsaan melawan kolonialisme. Irama hidup masyarakat jajahan yang dilecut oleh kepentingan kolonial untuk menumpuk kekayaan pada gilirannya mengungkapkan dirinya ke dalam struktur perasaan baru yang tak lagi disekat-sekat oleh batasan suku dan bahasa daerah, tetapi dipersatukan lewat bahasa Melayu pasar ke dalam suatu identitas kolektif sebagai satu bangsa terjajah. Struktur perasaan baru ini mendongkel keluar sektarianisme dan primordialisme yang merupakan bagian dari struktur perasaan masyarakat Nusantara pra-abad ke-20. Bahasa Melayu pasar meredup akibat penghancuran

---

<sup>4</sup> “Sejumlah penulis menyatakan bahwa bahasa Melayu (tanpa membedakan tinggi atau rendah) memiliki watak yang egaliter dan tidak berjenjang. Asumsi ini perlu dipertanyakan kembali mengingat adanya bahasa Melayu tinggi yang mewakili dunia yang kolonial yang sangat tidak demokratis dan jelas jenjang-jenjangnya, dan bahasa Melayu rendah yang berbicara tentang dan kepada dunia Hindia yang baru dan modern. Kata-kata yang digunakan dalam dua bahasa ini kurang lebih sama, artinya tidak memiliki pengertian yang bertolak belakang. Namun yang penting sekarang adalah siapa dan bagaimana digunakannya. [...] Penggunaannya kemudian memungkinkan penulisnya dan juga pembaca berpikir tentang satu dunia baru di mana hirarki kolonial untuk sementara ditanggihkan. Kata-kata menjadi ajang pertempuran antara dua kekuatan yang menggunakannya, seperti kaca ”meneer” yang tetap dan pasti akan mengandung tata hormat dalam bahasa Melayu tinggi (jika tidak diterjemahkan menjadi ”toean”) atau dalam bahasa Belanda, dan mendapat makna yang sama sekali berbeda ketika muncul bersanding dengan ”babah kapitalisten”. Bahasa dengan begitu tidak memiliki watak egaliter atau demokratis pada dirinya (*in itself*) tapi jelas ditentukan oleh konteks penggunaannya.” (Farid, 2007: 77—78)



gerakan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1927. Namun, struktur perasaan baru yang diantarkannya telah menjadi bagian dari imajinasi angkatan muda pergerakan kebangsaan.

Pada 1928 para pemuda bersumpah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sepuluh tahun kemudian, digelar Kongres Bahasa Indonesia di Solo dengan agenda pembinaan bahasa Indonesia. Perhatian khusus diberikan pada pengayaan kosakata yang sebagian besar hendak dirujuk pada bahasa-bahasa Eropa dan bahasa Melayu, sambil mengabaikan bahasa daerah dan bahasa asing non-Eropa (Sanskerta, Arab, Cina, dan sebagainya) (Samuel, 2008: 186). Berkaitan dengan itu adalah bagaimana rumusan Sumpah Pemuda tentang bahasa dirumuskan ulang dalam bentuk dan makna yang sangat berbeda. Yang semula berbunyi “Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia” diubah menjadi “Kita berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia”. Alih-alih menempatkan bahasa Indonesia dalam upaya “menjunjung bahasa persatuan”, Kongres Bahasa Indonesia pertama ini menempatkannya sebagai “bahasa satu” (seolah dengan pengertian “bahasa satu-satunya”). Keith Foulcher (2008) memperlihatkan bagaimana pengertian baru itu terus bertahan sampai pada masa Orde Baru. Situasi ini secara tidak langsung menggambarkan kegamangan pascakolonial di bidang bahasa, yaitu penentuan hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah setelah tumbang kolonialisme.

Hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah merupakan isu penting sampai dengan setelah kemerdekaan. Hal ini menandai pergeseran baru dalam struktur perasaan masyarakat Indonesia. Kalau identitas kebangsaan Indonesia dibentuk dari proses perlawanan terhadap tatanan kolonial, lantas apa yang menopang identitas tersebut ketika tatanan kolonial telah disingkirkan? Kemerdekaan, dengan demikian, memberikan tantangan baru bagi pembentukan identitas nasional. Perjuangan antikolonial melalui mobilisasi massa lewat partai-partai politik dan mobilisasi bahasa lewat pers dan *vergadering* yang menandai era prakemerdekaan telah membentuk struktur perasaan kaum pergerakan sampai dengan 1945. Namun, setelah pengakuan kedaulatan 1949, ketika identitas nasional tidak lagi dimobilisasi di sekitar perjuangan antikolonial, apa yang mengikat kebangsaan kita selain rumusan yang tertera pada konstitusi? Bagaimana, khususnya, identitas nasional itu dirumuskan dalam kaitannya dengan identitas budaya masyarakat Indonesia yang beraneka ragam?

Persoalan itu mengemuka juga sebagai isu kebahasaan. Dalam proses pengarusutamaan bahasa Indonesia yang terjadi setelah kemerdekaan, seperti dicatat oleh seorang peneliti, terdapat risiko peminggiran bahasa-bahasa daerah: “penyebarluasan bahasa Indonesia, pengurangan jumlah dialek” (Samuel, 2008: 229).<sup>5</sup> Tak kurang dari Ki Hadjar Dewantara sendiri yang mencatat dalam *Mimbar Indonesia*, 17 Juli 1948:

“Sebagai kita ketahui, di negeri kita Indonesia dalam hal itu hingga kini masih ada orang-orang, jang menghendaki lenjapnja bahasa daerah dari daftar peladjaran di sekolah-sekolah rendah. Sangat boleh jadi keadaan ini disebabkan karena pengaruh

---

<sup>5</sup> Jauh setelah kemerdekaan, sampai dengan tahun 1995, masih terdengar pendapat yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia tidak dipakai oleh 90% warga negara Indonesia di dalam rumah mereka dan bahwa bahasa daerah masih dilihat sebagai “ancaman terhadap bahasa nasional” (Heryanto 1995: 5).



politik ‘divide et impera’ dari bangsa Belanda, yang menimbulkan dan menjuburkan rasa ‘proviincialisme’ dikalangan rakyat kita didaerah-daerah diseluruh Indonesia.”

Ki Hadjar memandang pentingnya hubungan yang harmonis antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Penyebabnya adalah, seperti yang ia tulis dalam sebuah karangan di majalah *Keluarga* pada Desember 1952, “bahasa-bahasa daerah itu perlu dipakai untuk dapat memperoleh perkembangan yang sesuai dengan kodratnya pribadi serta alam yang mengelilinginya (dan inilah perkembangan yang sebaik-baiknya), tetapi juga karena di dalam bahasa-bahasa daerah itu kerap kali tersimpan nilai-nilai kebatinan, yang sangat berharga.”

Pendapat yang mementingkan peran bahasa daerah dalam memperkaya bahasa nasional ini diperkuat juga oleh Sutan Takdir Alisjahbana. Ia menyebut tiga manfaat bahasa daerah dalam pengembangan bahasa Indonesia: sebagai bahan baku peristilahan, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tata bahasa, serta sarana pewarisan khazanah budaya sejauh bahasa daerah dapat dipandang sebagai “penjelmaan kebudayaan yang lama” (Alisjahbana 1955: 217). Pendapat serupa ini diadopsi menjadi keputusan resmi Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1954, yakni dengan mengakui bahwa “untuk memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia, hendaklah terutama diambil kata2 dari bahasa daerah dan bahasa jang serumpun.” Keputusan ini pada prinsipnya dinyatakan kembali dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* yang dikeluarkan Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia pada tahun 1975 (Kridalaksana, 1991: 326 & 328) dan terus dijadikan acuan kebijakan peristilahan hingga era pasca-Reformasi (Moeliono, 2001: 6).

Namun, usaha memperkaya bahasa Indonesia melalui bahasa daerah kemudian menjadi lebih rumit dengan masuknya gelombang globalisasi, terutama sejak dekade 1990-an. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah mesti berhadapan dengan bahasa Inggris yang masuk di segala lini kehidupan masyarakat. Keprihatinan ini tercermin dalam keputusan Kongres Bahasa Indonesia VII 1998 yang memperlihatkan keresahan menghadapi gelombang bahasa Inggris.<sup>6</sup> Kegelisahan itu kembali mengemuka dan makin menjadi, sebagaimana terlihat dalam rumusan Kongres Bahasa Indonesia VIII 2003.<sup>7</sup> Dalam Kongres Bahasa Indonesia IX 2008, kegelisahan itu berkisar pada isu “ketahanan budaya” yang dilatari oleh pertimbangan berikut: “Dalam era teknologi informasi dan komunikasi ini setiap bangsa berupaya keras untuk mempertahankan identitasnya. Identitas itu terancam oleh proses homogenisasi budaya yang dipicu oleh keberhasilan industri budaya dari negara-negara lain” (Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I—IX, 2011: 110).

---

<sup>6</sup> “Era globalisasi ditandai, antara lain, oleh meningkatnya kontak budaya dan komunikasi antarbangsa, terutama dengan menggunakan bahasa Inggris. Dalam hubungan itu, kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa yang digunakan di Indonesia perlu dikukuhkan.” (Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I-IX 2011: 85)

<sup>7</sup> “[...] tantangan globalisasi. Kondisi itu telah menempatkan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, pada posisi strategis yang memungkinkan bahasa itu makin jauh memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, mau tidak mau, dihadapkan secara frontal pada kenyataan bahwa penggunaan bahasa asing tersebut makin meluas.” (Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I-IX 2011: 96)





Sampai di sini, dapat kita lihat, bahwa isunya bukan lagi melulu bahasa—peristilahan, penerjemahan, bahkan pembakuan bahasa—melainkan kebudayaan. Globalisasi membawa perubahan pada irama hidup masyarakat kita. Pola hubungan sosial yang mengemuka pada dua dekade terakhir ini sulit dibayangkan dalam dekade-dekade sebelumnya. Semua itu membawa perubahan struktur perasaan bangsa kita. Hari ini kita sudah menjauh dari sumber identitas nasional kita, yakni persatuan budaya yang terbentuk sebagai tanggapan melawan kolonialisme, jauh pula dari sumber identitas budaya tradisi yang perlahan-lahan tergeser oleh cara dan irama hidup modern.

Dalam perspektif ini, dapat dikatakan bahwa sekarang isunya bukan lagi kebebasan berbahasa seperti disebut-sebut Ariel Heryanto pada era Orde Baru. Isunya bukan lagi pembakuan bahasa seperti pada masa Orde Baru yang oleh sebagian kalangan diartikan sebagai rekayasa bahasa demi konsolidasi ideologi Pembangunanisme (Heryanto, 1990; Heryanto, 1995). Bahkan, upaya pembakuan yang paling sistematis pun akan mentah berhadapan dengan globalisasi apabila tidak dijalankan dengan mempertimbangkan keadaan budaya kebangsaan kita hari ini. Masalahnya bukan perlu/tidaknya perencanaan bahasa, bukan boleh/tidaknya pembakuan bahasa, melainkan bagaimana hal-hal itu dijalankan atas dasar pertimbangan kebangsaan.

Sekarang isunya adalah redupnya imajinasi kebangsaan yang menjalin bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah dalam satu kesatuan kebangsaan. Sekalipun permasalahan ini mengemuka akibat dampak globalisasi, akarnya tidak terletak pada globalisasi, tetapi pada cara kita mengelola budaya kebangsaan.

Dalam artikelnya, “Indonesian Nationalism Today and Future” (1999), Benedict Anderson memberikan penjelasan menarik mengenai kemunculan Organisasi Papua Merdeka yang bermula sejak masa Orde Baru. Baginya, kemunculan OPM bukan disebabkan rakyat Papua tidak dilibatkan dalam upaya bersama membayangkan proyek kebangsaan Indonesia, melainkan disebabkan rakyat dipaksa menerima narasi jadi yang dibuat di Jakarta. Demikian pula halnya dengan kegelisahan kita tentang menyurutnya ketahanan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah berhadapan dengan bahasa Inggris sejak era globalisasi. Angkatan muda kita meninggalkan cara berbahasa Indonesia “yang baik dan benar” bukan karena cara itu kurang disosialisasikan, atau karena kita tidak memiliki sarana penertiban bahasa, melainkan karena struktur perasaan mereka tidak lagi diisi oleh cerita-cerita rakyat dan riwayat sejarah kebangsaan, tetapi oleh para pahlawan Marvel dan sinetron Amerika. Mereka lebih banyak memikirkan semesta Marvel dibandingkan dengan semesta tradisi dan kebudayaan nasional. Mereka tidak merasa terlibat dalam proyek politik untuk merakit masa depan kolektif sebagai bangsa melalui imajinasi kebudayaan bersama.

Dengan demikian, isu pokoknya adalah *kepemilikan*. Sejauh mana setiap warga masyarakat kita merasa memiliki bahasa dan kebudayaan nasional serta daerahnya? Masalah kepemilikan ini, pada akhirnya, berhulu pada persoalan *akses* dan *pelibatan* masyarakat. Sejauh mana tata kelola kebahasaan dan kebudayaan yang ada mendorong peningkatan, perluasan, dan pemerataan akses serta pelibatan masyarakat terhadap hal-hal kebahasaan dan kebudayaan? Ini pertanyaan pokok kita.



## 2. Pengelolaan Bahasa Indonesia dalam Bingkai Pemajuan Kebudayaan

Kegelisahan tentang ditinggalkannya bahasa daerah dan budaya tradisi merupakan gejala yang ditemukan di hampir setiap daerah di Indonesia. Dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tingkat kabupaten/kota yang disusun oleh dinas kebudayaan yang bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di bidang kebudayaan setempat, hal itu tercermin dengan jelas. Dokumen PPKD adalah dokumen perencanaan kebudayaan daerah dengan masa berlaku 20 tahun yang akan menjadi dasar penyusunan Strategi Kebudayaan di tingkat nasional. Saat ini dokumen tersebut tengah disusun serentak di 514 kabupaten/kota sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.

Dari 120 dokumen PPKD kabupaten/kota yang terdata sampai saat ini, semuanya mengeluhkan adanya permasalahan tergerusnya budaya tradisi dan bahasa daerah akibat modernisasi dan globalisasi. Dalam Dokumen PPKD Kabupaten Tulungagung, misalnya, disebutkan permasalahan di bidang bahasa: “Ketidaktahuan generasi muda mengenai keberagaman bahasa daerah disebabkan pengaruh dari zaman digital yang membuat bahasa daerah sedikit demi sedikit terkikis sehingga bahasa ibu terlupakan” (PPKD Tulungagung, 2018: 221). Demikian pula dengan Dokumen PPKD Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur yang menyebutkan, “Tuntutan globalisasi [membuat] bahasa asing lebih sering digunakan daripada bahasa daerah” (PPKD Penajam Paser Utara, 2018: 51). Hal yang sama kita temukan di Kota Bukittinggi, “Lemahnya daya tahan masyarakat, terutama generasi muda dalam menghadapi pengaruh dialek atau pun kosakata asing, memengaruhi bahasa Minangkabau di Bukittinggi” (PPKD Kota Bukittinggi, 2018: 38). Dengan demikian, kita menemukan masalah yang sama, baik di kawasan Indonesia bagian barat, tengah, maupun timur.

Permasalahan di bidang bahasa yang diidentifikasi oleh setiap kabupaten/kota dalam kaitannya dengan pengaruh perkembangan teknologi informasi bukan semata membidik pengaruh bahasa asing, melainkan juga bahasa Indonesia sendiri. Kabupaten Halmahera Barat, misalnya, menaruh perhatian khusus pada gejala tersebut, “Generasi muda umur 10—15 tahun cenderung menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia; tidak ada generasi muda yang ingin mempelajari bahasa ibu” (PPKD Halmahera Barat, 2018: 116). Bahkan, Kabupaten Solok Selatan yang rumpun bahasanya masih dekat dengan akar bahasa Indonesia dapat mempersoalkan: “Banyak di antaranya menukar nama tempat dan nama benda, maksudnya situs dan objek budaya, dengan bahasa Indonesia” (PPKD Solok Selatan, 2018: 89). Hal ini memperlihatkan tegangan sejak awal republik yang belum selesai antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, atau secara lebih umum, antara kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah.

Dengan gelombang globalisasi yang tidak mungkin dihindarkan, hampir setiap kabupaten/kota merasakan gerusan tidak hanya pada bahasa daerah, tetapi juga adat dan budaya tradisi. Kota Malang mencatat “Menjamurnya kontrakan dan kos-kosan untuk mahasiswa dan ratusan kompleks perumahan baru sebagai sebab terkikisnya adat budaya tradisi” (PPKD Kota Malang, 2018: 30—31).



Kabupaten Garut menggarisbawahi perubahan paradigma masyarakat yang mendorong ditinggalkannya sendi-sendi budaya tradisi: “Cara berpikir masyarakat yang modern membuat beberapa adat istiadat ditinggalkan, selain itu, masyarakat keberatan akan finansial, waktu dan lainnya” (PPKD Garut, 2018: 29). Gerusan akibat proses globalisasi ini tidak bisa dibatasi dalam pengertian pembaratan (*westernization*) semata, tetapi juga benturan antara budaya tradisi dan budaya agama-agama samawi, seperti tampak dalam rumusan masalah Kabupaten Blora: “Adanya benturan antara nilai-nilai ritus, baik antarkepercayaan maupun dalam satu kepercayaan (Benturan antara agama samawi dengan budaya)” (PPKD Blora, 2018: 62). Benturan antara tradisi berbasis kepercayaan lokal dan budaya yang dibawa masuk agama-agama samawi semacam ini jamak ditemukan di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

Melalui sejumlah contoh permasalahan tata kelola bahasa daerah dan budaya tradisi yang tercantum dalam PPKD kabupaten/kota, kita dapat melihat betapa kita sedang dihadapkan pada tiga tegangan sekaligus:

- 1) tegangan antara bahasa Indonesia dan daerah dengan bahasa asing;
- 2) tegangan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah; dan
- 3) tegangan antara budaya modern dan budaya tradisi.

Tegangan yang pertama adalah yang paling mudah diamati. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pula penyebaran bahasa asing, utamanya Inggris, melalui produk-produk budaya dan hiburan populer (film, musik, konten media sosial). Tegangan kedua muncul bersamaan dengan yang pertama: sementara bahasa Indonesia dan bahasa daerah mendapat gempuran dari bahasa asing, makin termasyarakatkannya bahasa Indonesia berarti makin terpinggirkannya bahasa daerah. Tergerusnya bahasa daerah berarti redupnya sumber rujukan budaya tradisi yang menopang kebudayaan nasional kita. Oleh karena itu, di mana-mana kita saksikan keluhan tentang budaya modern yang datang lewat globalisasi dan narasi nasional menggerus budaya tradisi.

Selanjutnya, pertanyaan kita adalah mengapa budaya tradisi yang berakar berabad-abad dalam masyarakat kita bisa tergerus oleh budaya modern yang baru datang satu abad terakhir? Irama hidup yang mengondisikan tatanan budaya tradisi telah tergantikan oleh irama hidup modern. Pergeseran pola hubungan sosial itu mendorong pergeseran pada struktur perasaan masyarakat zaman sekarang. Struktur perasaan yang bermanfaat untuk membaca dan memaknai daur hidup agraris dan komunal tidak lagi berguna sebagai pegangan untuk membaca dan memaknai daur hidup industrial dan individual. Irama hidup modern tidak bisa dibaca melalui struktur perasaan tradisi. Bahasa yang tumbuh dari kebutuhan sosial untuk mempercakapkan alam tidak mampu menjawab kebutuhan untuk mempercakapkan mesin. Dengan demikian, tantangan terbesar dalam pelestarian budaya tradisi dan bahasa daerah adalah membuatnya relevan dalam menjawab masalah kehidupan sosial hari ini.

Di sini, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan kita pedoman. Dalam Undang-Undang tersebut, pemajuan kebudayaan dijalankan melalui empat upaya, yakni perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan pembinaan SDM serta lembaga. Upaya pemajuan ini diterapkan pada objek pemajuan kebudayaan yang digolongkan ke dalam 10 jenis: (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat,



(4) ritus, (5) pengetahuan tradisional, (6) teknologi tradisional, (7) seni, (8) bahasa, (9) permainan rakyat, dan (10) olahraga tradisional.

Keempat upaya pemajuan tersebut membentuk sebuah siklus yang bergerak dalam dua arah, bergantung apakah kita melihatnya dari segi objektif atau subjektif. Yang dimaksud siklus pemajuan kebudayaan dari segi objektif adalah agar ada pemanfaatan atas objek, objek tersebut harus dikembangkan terlebih dahulu. Pada gilirannya, hal tersebut mensyaratkan adanya kerja perlindungan yang membuat objek tersebut tetap ada dan lestari. Pembinaan berjalan secara paralel dengan ketiga upaya yang lain. Kendati demikian, siklus itu dapat dilihat juga dari segi subjektif, yakni dari sisi pelaku keempat upaya tersebut. Agar masyarakat berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengembangan atas suatu objek, objek itu sendiri perlu terlihat potensi manfaatnya. Jika tidak begitu, kerja perlindungan akan terus dipandang sebagai beban yang sebisa mungkin dihindari.

Isunya, dengan demikian, adalah menghidupkan kembali peran struktur perasaan lama—budaya tradisi dan bahasa daerah—dalam membaca kenyataan dan menjawab persoalan aktual. Hal ini menjadi penting bagi pengembangan bahasa Indonesia karena, seperti telah kita lihat, dalam budaya tradisi yang terkandung dalam bahasa daerah lah terletak bahan baku bagi pembentukan identitas kebudayaan nasional. Hanya dengan menggali potensi kekayaan budaya tradisi, kita dapat hadir dalam percaturan budaya dan bahasa di dunia sebagai penentu arah, bukan hanya konsumen, kebudayaan global.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 disebutkan bahwa pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Dalam Pasal yang sama, ketahanan budaya didefinisikan sebagai kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan. Pemajuan kebudayaan bukan hanya langkah bertahan saja karena upaya peningkatan ketahanan budaya didampingi juga dengan upaya meningkatkan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Dengan demikian, pemajuan kebudayaan adalah juga langkah keluar mewarnai kebudayaan dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Di situ, diharapkan terjadi balikan dari gelombang globalisasi dari yang selama ini bergerak mengintervensi budaya Indonesia menjadi gerakan budaya Indonesia yang bergerak mengintervensi khazanah budaya dunia, suatu globalisasi budaya Indonesia.

Agar semua itu terjadi, begitu banyak pekerjaan besar yang harus kita lakukan. Makalah ini tidak akan menguraikan semuanya. Akan tetapi, setidaknya di sini kita dapat mengidentifikasi sejumlah langkah dari yang bersifat paradigmatik hingga yang bersifat praktis. Ada tiga langkah yang dapat disebut di sini.

*Pertama*, pengertian kita tentang kebudayaan nasional Indonesia perlu diperluas. UU Nomor 5 Tahun 2017 menggunakan definisi “kebudayaan nasional” yang cukup longgar, yakni “keseluruhan proses dan hasil interaksi antarkebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia”. Dengan definisi semacam itu, UU ini melampaui perdebatan tentang kebudayaan yang “asli” dan “tidak asli” Indonesia dengan menyatakan bahwa semua proses dan hasil interaksi antarkebudayaan yang ada di Indonesia adalah bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. Definisi ini punya semangat merangkul semua golongan. Alasannya



adalah kebudayaan Indonesia sendiri dibentuk dari serapan atas berbagai unsur budaya yang beredar di kawasan, mulai dari Arab, Cina, sampai budaya Barat. Demikian pula dengan budaya tradisi dan adat kita. Tradisi dan adat itu tidak murni berasal dari Indonesia, tetapi diserap dan dimodifikasi dari budaya asing. Contohnya adalah tari Kecak Bali yang diciptakan oleh seniman Jerman, Walter Spies, bersama masyarakat Bali di awal abad ke-20; baju koko yang berasal dari budaya Cina peranakan; dan seni tradisi Barongan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berasal dari Barongsai Cina.

*Kedua*, aspek-aspek budaya kita baru bisa dilindungi apabila aspek budaya tersebut diperlihatkan manfaatnya dalam menjawab tantangan hidup masyarakat hari ini. Agar manfaat itu muncul, aspek-aspek kebudayaan itu perlu dikembangkan, yakni diperkaya keberagamannya melalui proses interaksi antarbudaya yang ada di Indonesia, baik yang sudah mengakar lama dalam sejarah budaya kita maupun yang baru datang dari luar kawasan Indonesia. Artinya, pengembangan budaya hanya bisa dijalankan melalui peningkatan, perluasan, dan pemerataan keterpaparan masyarakat pada keanekaragaman budaya. Arahnya adalah mendorong peningkatan keanekaragaman budaya. Kekayaan budaya tradisi kita tidak dikembangkan sehingga bermanfaat menjawab tantangan kehidupan masyarakat. Sementara itu, budaya modern juga belum mengakar kuat secara merata dalam masyarakat kita sehingga masyarakat kita hidup dalam krisis jati diri budaya. Dalam situasi krisis seperti itu ada risiko penguatan identitas primordial (fanatisme dan prasangka berbasis SARA) yang mengarah pada intoleransi antarkelompok budaya. Ancaman ini hanya bisa dijawab dengan pengembangan kekayaan budaya kita, khususnya melalui peningkatan, perluasan, dan pemerataan keterpaparan masyarakat pada keanekaragaman budaya.

*Ketiga*, khusus di bidang bahasa, untuk dapat meningkatkan pengaruh bahasa daerah pada bahasa Indonesia, kita perlu memahami keadaan interaksi antarbudaya di Indonesia. Kita mesti memetakan dan mendorong terjadinya interaksi antarbudaya karena hanya lewat itulah pemerataan pengalaman kebangsaan bisa terjadi. Realitas kebangsaan yang beragam dari segi bahasa dan budaya harus tergambarkan sebagai kenyataan aktual bagi setiap warga bangsa. Kesadaran tersebut haruslah menjadi personal, mempribadi dalam setiap anggota bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan pemetaan atas sebaran *aktual* bahasa daerah di Indonesia, bukan hanya sebaran *asal* bahasa daerah. Penyusunan dokumen PPKD adalah langkah awal menuju hal itu. Lewat dokumen ini, kita dapat mengerti bukan hanya kawasan asal bahasa Batak, misalnya, melainkan juga persebarannya di setiap kabupaten/kota di Indonesia.

Pada akhirnya, usaha menempuh langkah-langkah itu juga mesti dilandasi oleh kesadaran bahwa perkara kebahasaan merupakan bagian yang takterpisahkan dari perkara kebudayaan yang lebih umum. Pengelolaan bahasa mesti menyentuh pula aspek kebudayaan—struktur perasaan masyarakat—agar proses pengelolaan tersebut dirasakan sebagai bagian dari kerja bersama seluruh anggota masyarakat.



### 3. Sastra sebagai Penghela Pemajuan Bahasa

Bagaimana caranya supaya pengelolaan bahasa bersentuhan dengan struktur perasaan masyarakat, sekaligus mendorong interaksi antarbudaya dan memperkuat pemanfaatan bahasa? Di sini kesusastraan memegang peranan penting.

Ditinjau dari fungsi pemanfaatannya, sastra dapat dilihat sebagai hilir dari proses pemajuan bahasa. Kesusastraan merupakan perwujudan dari segala potensi bahasa. Tata kelola bahasa yang baik dan berlandas pada pertimbangan kebudayaan yang kaya akan membuka jalan bagi penciptaan karya-karya sastra bermutu tinggi yang menampilkan keindahan bahasa Indonesia. Tiga macam pemanfaatan dari potensi tersebut dapat diidentifikasi di sini.

*Pertama*, bahasa dimanfaatkan dalam wujud sastra untuk memperkuat karakter bangsa. Sastra merupakan instrumen pendidikan karakter karena sastra mendorong pembaca untuk *berani merasa* dan *berani berpikir mandiri*. Apa yang disebut “karakter” pada dasarnya merupakan prinsip yang memberi orientasi pada pikiran, tindakan, dan perilaku. Dengan didorong untuk berani merasa dan berani berpikir mandiri lewat membaca sastra, setiap pembaca sebetulnya didorong untuk berani memegang prinsip, menarik sikap di hadapan keadaan—singkatnya, berani berkarakter.

*Kedua*, bahasa dimanfaatkan dalam wujud sastra untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh nyatanya adalah novel *Laskar Pelangi*. Setelah diterbitkan pada tahun 2005, novel itu difilmkan pada 2008 dan sejak saat itu lokasi pengambilan gambarnya dijadikan objek wisata. Sejak 2008 hingga sekarang, paket tur “Laskar Pelangi” dan pengembangan kawasan wisata “Laskar Pelangi” bermunculan di Belitung. Hasilnya adalah antara 2010-2014 pariwisata Belitung naik 410% sehingga menghasilkan pendapatan asli daerah yang mengalahkan sektor pertambangan. Dampaknya adalah pergeseran paradigma kebijakan pengembangan wilayah: Bupati berencana akan mengalihkan fokus pengembangan kawasan dari yang semula berorientasi pada pertambangan timah menjadi pengembangan wisata. Semua ini terjadi secara “tak sengaja”, hanya karena Andrea Hirata menulis novel tentang Belitung dan Miles Film mengangkatnya ke layar lebar. Bayangkan, kalau semua itu dirancang secara terpadu dari awal dengan mempertimbangkan *value chain* mulai dari pengelolaan bahasa, ekspresi sastra, sampai dengan pemanfaatannya sebagai penghela perekonomian masyarakat.

*Ketiga*, bahasa dimanfaatkan dalam wujud sastra sebagai sarana diplomasi budaya Indonesia di tingkat internasional. Melalui sastra, bahasa Indonesia dapat menjadi ujung tombak peningkatan pengaruh budaya Indonesia di dunia. Contohnya adalah sosok sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang pernah dibicarakan di tingkat dunia sebagai kandidat penerima Nobel Sastra. Dalam bentuknya yang terkini, contohnya adalah novel-novel Eka Kurniawan yang belakangan masuk bursa kandidat pemenang Man Booker International Prize, sebuah penghargaan bergengsi yang pemenangnya akan menjadi kandidat penerima Nobel Sastra. Dengan cara ini, bahasa dan budaya Indonesia akan makin mewarnai peradaban dunia.

Ditinjau dari fungsi pengembangannya, sastra dapat pula dilihat sebagai hulu pemajuan bahasa. Kesusastraan memegang fungsi pengembangan terhadap bahasa Indonesia: memperkaya peristilahan, memperhalus nuansa, dan memperkuat daya



ungkap bahasa Indonesia. Lewat karya-karya sastra yang inovatif dan eksperimental, bahasa Indonesia menjadi makin kaya. Sajak-sajak Chairil Anwar, umpamanya, membentuk rasa bahasa kita serta cara kita bercakap dan merenungkan sesuatu. Tanpa kelugasan bahasa Indonesia yang diperlihatkan oleh sajak-sajaknya, mungkin bahasa Indonesia masih mendekam dalam cakrawala bahasa Melayu Tinggi yang serba-aristokratis dan kaku. Sajak-sajak Chairil membongkar sekat-sekat kelas sosial dalam berbahasa, membuat bahasa Indonesia menjadi akrab dalam perasaan sendiri atau pun dalam rasa bersama sebagai bangsa.

Kesusastraan, dengan demikian, amatlah tepat dipandang sebagai *penghela kemajuan bahasa*. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi agar peran penghela tersebut dapat makin diperkuat dan diperluas. Caranya ada banyak, mulai dari pemberian penghargaan sastra kepada karya sastra Indonesia yang berhasil mengolah khazanah tradisi sampai dengan program residensi sastrawan ke daerah 3T untuk memperkaya kesadaran kebangsaan dan keanekaragaman yang diharapkan akan tercermin dalam karya-karyanya.

Hal yang penting untuk ditempuh adalah juga memasyarakatkan pencapaian tertinggi kesusastraan kita atau apa yang biasa disebut “kanon sastra”. Kanon sastra adalah daftar karya sastra yang menjadi tonggak penting dalam riwayat perjalanan kesusastraan dan kebudayaan suatu bangsa. Kanon memiliki beberapa fungsi, antara lain, (1) merekam perkembangan budaya suatu bangsa; (2) menjadi standar acuan tentang mutu artistik dari kesusastraan suatu bangsa; dan (3) menjadi acuan pokok mengenai karakter suatu bangsa. Contohnya adalah buku *The Western Canon: The Books and School of the Ages* karangan Harold Bloom (1994) yang mendaftar 26 karya sastra sebagai kanon atau tonggak yang mencerminkan kekayaan khazanah budaya bangsa-bangsa Barat.

Direktorat Jenderal Kebudayaan sedang menyusun kanon semacam itu sebagai acuan penguatan pendidikan karakter bangsa berbasis khazanah budaya. Dengan bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam pemilihan sejumlah karya, program bernama “Pusaka Sastra Indonesia” itu diharapkan dapat memberikan daftar bacaan sastra yang diacu oleh setiap jenjang pendidikan dengan maksud agar semua siswa kita mendapatkan akses pada kekayaan khazanah bahasa dan budaya Indonesia. Dengan adanya kanon semacam itu, diharapkan akan terwujud peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan bahasa dalam wujud sastra sehingga setiap warga bangsa kita menjadi bangga akan keindahan bahasa dan budayanya.

## **PENUTUP**

Sampai di sini, ada sejumlah kesimpulan yang dapat kita catat. *Pertama*, identitas kebangsaan kita bertopang pada pola hubungan sosial yang dijahit melalui bahasa persatuan dengan narasi yang dapat dibayangkan bersama. *Kedua*, narasi kebangsaan itu bukan hal yang tetap dan abadi, melainkan berubah seturut pergeseran pola hubungan sosial yang menstruktur masyarakat kita. *Ketiga*, masalah-masalah pokok di bidang pengelolaan bahasa dan kebudayaan banyak bersumber pada pergeseran narasi kebangsaan tersebut; kenyataan hari ini tidak dapat banyak dijawab atau diungkapkan oleh budaya tradisi dan bahasa daerah. *Keempat*, pengembangan bahasa Indonesia hanya bisa dijalankan lewat kemajuan kebudayaan, termasuk di dalamnya budaya tradisi dan bahasa daerah sebagai



sumber imajinasi tentang identitas nasional. *Kelima*, pelestarian budaya tradisi dan bahasa daerah hanya mungkin dilakukan apabila keduanya dikembangkan, diperkaya keberagamannya, untuk menanggapi tantangan kehidupan sosial masa kini. *Keenam*, pelestarian budaya tradisi dan bahasa daerah dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia mesti dijalankan dengan memperhatikan dan memperkuat interaksi antarbudaya di Indonesia sehingga semua kelompok budaya dapat mengakses dan berpartisipasi dalam narasi kebangsaan hari ini. *Ketujuh*, kesusastraan merupakan penghela dari seluruh usaha pengelolaan bahasa dalam rangka pemajuan kebudayaan itu.\*\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Sutan Takdir. (1955). "Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah". Dalam Sutan Takdir Alisjahbana. (1978). *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 203—221.
- Anderson, Benedict. (1999). "Indonesian Nationalism Today and Future". *Indonesia*, Vol. 67 April, 1999, hlm. 1—11.
- (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2011). *Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I—IX Tahun 1938—2008*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Bloom, Harold. (1994). *The Western Canon: The Books and School of the Ages*. Massachusetts: Houghton Mifflin Harcourt.
- Farid, Hilmar. (2007). *Politik, Bacaan dan Bahasa pada Masa Awal Pergerakan: Suatu Studi Awal*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Foulcher, Keith. (2008). *Sumpah Pemuda: Makna & Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu
- Heryanto, Ariel. (1990). "The Making of Language: Developmentalism in Indonesia". Dalam *Prisma* 50, September 1990, h. 40-53.
- (1995). *Language of development and development of language: The case of Indonesia*. Canberra: The Australian National University.
- Ki Hadjar Dewantara. (1948). "Soal Bahasa". *Mimbar Indonesia*, No. 29, 17/7/1948, Th. II, hlm. 10—12 dan 29.
- (1952). "Bahasa dalam Hidup Manusia dan Bangsa". *Majalah Keluarga*, No: 1, Th. I, Desember 1952, hlm. 7—8 dan 31.
- Kridalaksana, Harimurti. (1991). "Sejarah Peristilahan dalam Bahasa Indonesia". Dalam Harimurti Kridalaksana, ed. 1991. *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Kanisius, h. 315-334.
- Lefebvre, Henri. (2004). *Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life*, terj. Stuart Elden dan Gerald Moore. London: Continuum.
- Moeliono, Anton. (2001). *Tata Istilah*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Tulungagung*. (2018). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.
- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara*. (2018). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Bukittinggi*. (2018). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.





- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.* (2018). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.
- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan.* (2018). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan.
- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Malang.* (2018). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang.
- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Garut.* (2018). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.
- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Blora.* (2018). Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora.
- Salmon, Claudine. (2010). *Sastra Indonesia Awal: Kontribusi Orang Tionghoa*, terj. Ida Sundari Husen, dkk. Jakarta: KPG.
- Samuel, Jérôme. (2008). *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia? Pemodernan Kosakata dan Politik Peristilahan*, terj. Dhany Saraswati Wardhany. Jakarta: KPG.
- Toer, Pramoedya Ananta. (2003). *Tempo Doeloe: Antologi Sastra Pra-Indonesia*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Williams, Raymond. (1960). *Culture and Society, 1780-1950*. New York: Anchor Books.
- (1965). *The Long Revolution*. Middlesex: Penguin Books.
- (1983). *Keywords: A vocabulary of culture and society*. New York: Oxford University Press.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 3 Kelompok 5**

Judul : Pemanfaatan Bahasa dan Sastra untuk Membangun Budaya Bangsa  
Pembicara : Hilmar Farid  
Hari, Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2018  
Pukul : 10.15—11.45  
Moderator : Dr. Ganjar Harimansyah  
Pencatat : 1. Miranti Sudarmaji  
2. Mukhamdanah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Bagaimana cara menghadapi sikap berbahasa masyarakat Indonesia yang cenderung bercampur-campur? Gejala ini merupakan gejala kebudayaan. Kita ingin agar orang berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Kita bertindak sebagai polisi. Kita berusaha agar anak-anak mengenal budaya dan tradisi. Namun, dalam masyarakat umum ada dinamika yang besar. Kita harus memahami dinamika ini karena ini bersumber dari masyarakat kita.
2. Keberagaman bahasa merupakan berkah. Indonesia, melalui Badan Bahasa, saat ini telah mencatat 668 bahasa daerah. Namun, satu bahasa diperlukan sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang begitu beragam, tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam pemerintahan. Ini yang merekatkan bangsa Indonesia.
3. Bukan waktunya lagi menyusun kebijakan-kebijakan berdasarkan anekdot, misalnya untuk mengeluarkan kebijakan penting tertentu yang dijadikan dasar adalah anak sendiri, keponakan sendiri, atau pengalaman sendiri.
4. Identitas bahasa tidak mungkin hanya diserahkan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan menteri, dll.. Hal tersebut tidak akan laku di masyarakat, terutama pada masyarakat bawah.
5. Dalam Pasal 32 UU tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa saat kita bertindak sebagai polisi untuk alasan kelestarian, hal tersebut belum tentu sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Untuk mengatasi ini diperlukan kompetensi dan pendekatan yang berbeda-beda.
6. Selain bahasa, sastra juga tumbuh bersama bangsa ini. Sastra mempunyai kedudukan yang kuat meskipun kita belum sepenuh hati mengupayakannya. Untuk itu, kita harus mengupayakan agar sastra kembali diajarkan di sekolah-sekolah.



## Tanya Jawab

### Penanya 1

Nama : Devina

Instansi : IPB

### Pertanyaan:

1. Ketika sebuah kata mempunyai banyak turunan, misal *duduk*, *menduduki*, *mendudukkan*, mahasiswa sering bertanya dan mengalami kesulitan. Mengapa ini terjadi? Ada juga tanya mengapa *me-* ke *di-*. Apa bedanya korpus UI dengan KBBI V?
2. Untuk pengajaran sastra, sering kesulitan dengan diksi-diksi sastra. Bagaimana hal ini bisa diakses agar bisa membantu mahasiswa memahami karya sastra?

### Jawaban:

1. Sebagai contoh, penggunaan kata *memberdayakan* ketika digunakan oleh orang Indonesia. Hal ini dapat dilihat, contoh-contoh penggunaannya. Saat ini, lematisasi belum dilakukan. Korpusnya masih terbatas. Jadi, baru dapat ditampilkan *memberdayakan*, sedangkan turunannya belum ada, *diberdayakan*, *pemberdayaan*, *diberdayakan*, dll.
2. Korpus Universitas Indonesia bisa digunakan, tetapi saat ini belum dapat diakses.

### Penanya 2

Nama : Mario (FIB UI)

Instansi : UI

### Pertanyaan:

Korpus yang baik diambil dalam rentang berapa tahun?

### Jawaban:

Korpus yang baik dibuat dari bahan atau teks bergantung pada tujuannya, yaitu khusus, spesifik, sinkronis, atau diakronis. Korpus yang paling tua merupakan korpus sinkronis. Namun, kita juga dapat memasukkan teks sebelum kemerdekaan sampai sekarang.

### Penanya 3

Nama : Norma

Instansi : UI

### Pertanyaan:

1. Untuk pengumpulan data korpus teks, untuk validasinya jika terjadi salah tik, apakah harus diperbaiki atau dimasukkan seperti apa adanya?
2. Untuk transkripsi, jika berupa data lisan banyak sekali interjeksi, apakah harus dimasukkan juga atau dihilangkan?



**Jawaban:**

1. Untuk pengumpulan data korpus teks, selama ini diambil dari laman sehingga tidak akan dilakukan perubahan terhadap teks yang diperoleh. Namun, untuk pembersihan, misal  $m$  tetapi terekam  $i$  itu harus diubah.
2. Dalam korpus lisan, sering muncul kata-kata sebagai pengungkap perasaan, seperti interjeksi dan fatis. Jika interjeksi itu diulang lebih dari tiga, yang ditulis adalah yang tiga saja. Yang selebihnya, diabaikan. Bentuk tegun, bisa diabaikan kecuali untuk tujuan penelitian tertentu. Namun, secara umum, dapat diabaikan.

**Penanya 4**

Nama : Ahmad Muzaki

Instansi : UNJ

**Pertanyaan:**

Jika berbicara tentang data lisan, data harus ditranskripsikan. Apakah ada kemungkinan data tidak ditranskripsikan secara manual, tetapi dijadikan sebagai pendeteksi suara?

**Jawaban:**

Untuk korpus lisan, transkripsi memerlukan waktu yang cukup lama. Sampai saat ini, data lisan masih perlu ditranskripsikan meskipun sebenarnya sudah ada alat yang dapat mentranskripsikannya. Namun, alat ini masih sangat mahal, yaitu yang versi *company*.

**Penanya 5**

Nama : David

Instansi : UI

**Pertanyaan:**

1. Hak cipta, misalnya novel, dapat diperoleh dari mana?
2. Mungkinkah kita menggunakan anotasi selain dari BPPT?
3. Data untuk *Trebank* dapat diambil dari mana?

**Jawaban:**

1. Hak cipta dapat diperoleh dengan bantuan kampus atau penerbit. Namun, tidak semua penerbit akan memberikan kemudahan pemberian hak cipta.
2. Untuk surat kabar, kita dapat mendatangi redaksinya.
3. *Trebank* diperoleh dengan model konstituensi.

**Isu-isu Penting:**

1. Bagaimana cara menghadapi sikap berbahasa masyarakat Indonesia yang cenderung bercampur-campur? Gejala ini merupakan gejala kebudayaan. Kita ingin agar orang berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Kita bertindak sebagai polisi. Kita berusaha agar anak-anak mengenal budaya dan tradisi. Namun, dalam masyarakat umum ada dinamika yang besar. Kita harus memahami dinamika ini karena ini bersumber dari masyarakat kita.



2. Keberagaman bahasa merupakan berkat. Indonesia, melalui Badan Bahasa, saat ini telah mencatat 668 bahasa daerah. Namun, satu bahasa diperlukan sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang begitu beragam, tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam pemerintahan. Ini yang merekatkan bangsa Indonesia.
3. Bukan waktunya lagi menyusun kebijakan-kebijakan berdasarkan anekdot, misalnya untuk mengeluarkan kebijakan penting tertentu yang dijadikan dasar adalah anak sendiri, keponakan sendiri, atau pengalaman sendiri.
4. Identitas bahasa tidak mungkin hanya diserahkan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan menteri, dll. Hal tersebut tidak akan laku di masyarakat, terutama pada masyarakat bawah.
5. Dalam Pasal 32 UU tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa saat kita bertindak sebagai polisi untuk alasan kelestarian, hal tersebut belum tentu sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Untuk mengatasi ini diperlukan kompetensi dan pendekatan yang berbeda-beda.
6. Selain bahasa, sastra juga tumbuh bersama bangsa ini. Sastra mempunyai kedudukan yang kuat meskipun kita belum sepenuh hati mengupayakannya. Untuk itu, kita harus mengupayakan agar sastra kembali diajarkan di sekolah-sekolah.



### 3. Penyebaran Bahasa dan Sastra Indonesia melalui Pengajaran BIPA dan Ekspedisi Budaya

#### PENYEBARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA MELALUI PENGAJARAN BIPA DAN EKSPEDISI BUDAYA

**Liliana Muliastuti**

Universitas Negeri Jakarta

lmuliastuti@yahoo.com

#### **Abstrak**

Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional harus dilakukan dengan perencanaan matang. Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah, organisasi profesi, dan perorangan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyebaran bahasa dan sastra Indonesia melalui pengajaran BIPA dan ekspedisi budaya. Program profesionalisme para pengajar BIPA harus dapat diwujudkan melalui ketersediaan program pendidikan pengajar BIPA dan lembaga sertifikasi profesi pengajar BIPA. Keberhasilan internasionalisasi bahasa Indonesia sesuai dengan amanah UU Nomor 24 Tahun 2009 perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk para pelaku industri kreatif. Produk industri kreatif, seperti film, drama televisi, animasi, dan industri musik Indonesia, dapat menjadi magnet bagi orang asing mempelajari bahasa Indonesia. Penyebaran bahasa dan sastra Indonesia harus dilakukan secara sinergis dengan produk budaya lain sehingga tercipta “gelombang Indonesia” (*Indonesian wave*).

**Kata-kata kunci:** BIPA, ekspedisi budaya, internasionalisasi bahasa Indonesia

#### **Abstract**

*Improving the function of Indonesian language into an international language must be done with careful plannings. Various programs have been carried out by government, professional organizations, and individuals. One of the activities carried out was the spread of Indonesian language and literature through BIPA teaching and cultural expeditions. The professionalism program of BIPA teachers must be realized through the availability of BIPA teaching education programs and BIPA teaching professional certification institutions. The success of the internationalization of Indonesian language in accordance with the mandate of Law Number 24 Year 2009 needs to get support from various parties, including creative industry players. Creative industry products, such as films, television dramas, animation, and the Indonesian music industry, can be a magnet for foreigners to learn about Indonesia. The spread of Indonesian language and literature must be carried out in synergy with other cultural products so as to create an Indonesian wave.*

**Keywords:** BIPA, culture expedition, internationalization of Indonesian language

#### **PENDAHULUAN**

Penyebaran bahasa dan sastra Indonesia memerlukan sebuah perencanaan bahasa. Menurut Cooper dalam Siregar (2011), perencanaan bahasa sebagai bentuk atau kegiatan terencana yang memengaruhi bentuk dan penggunaan bahasa setidaknya dilakukan oleh unsur perorangan, lembaga pemerintah, dan berbagai komunitas seperti asosiasi profesi.



Perencanaan bahasa di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi salah satu momen terpenting dalam sejarah perencanaan bahasa Indonesia. Pada tanggal tersebut kita menetapkan satu bahasa persatuan. Ikatan psikologis kebangsaan kita diikat dengan janji bahwa kita satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pada momentum sejarah tersebut, bahasa Indonesia kita ditetapkan menjadi bahasa nasional.

Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia meningkat sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945. Konstitusi kita ini memuat Bab XV Pasal 36 yang menyatakan, “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.” Kedudukan bahasa Indonesia pun diperkuat menjadi bahasa negara. Sejak itu, baik pemerintah maupun masyarakat melakukan berbagai program kebahasaan yang membuat bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang. Dalam praktiknya, perencanaan bahasa akan selalu melibatkan tiga kegiatan penting: pembinaan, pengembangan, dan perlindungan.

Saat ini perencanaan bahasa Indonesia berada dalam lintasan sejarah penting karena menargetkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Hal tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang disahkan pada 9 Juli 2009. Bunyi Pasal 44 dalam Undang-Undang tersebut ialah sebagai berikut.

- (1) Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (1) dalam Pasal 44 tersebut mengingatkan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang harus dilakukan secara terencana. Artinya, program tersebut harus direncanakan dengan matang. Perencanaan bahasa yang matang sudah seharusnya melibatkan banyak pihak sehingga dapat memberikan masukan menyeluruh. Siapakah perencana dalam hal ini? Tentu saja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) sebagaimana disebutkan pada ayat (2). Badan Bahasa tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan perorangan, asosiasi profesi, dan lembaga pemerintah lain yang terkait dengan hal ini.

Mampukah kita mencapai amanah tersebut? Upaya apa saja yang telah dan harus dilakukan? Salah satu hal penting dan utama yang dapat dilakukan untuk mencapai amanah menginternasionalkan bahasa Indonesia adalah penyebaran bahasa dan sastra Indonesia melalui pengajaran BIPA dan ekspedisi budaya. Makalah ini akan membahas hal tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Peluang Bahasa Indonesia**

Hal yang harus disepakati pertama kali dalam perjuangan untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia adalah kesadaran bahwa kita melakukan kerja kebudayaan yang besar dan membutuhkan dukungan semua pihak. Mungkinkah hal tersebut diwujudkan? Mungkin saja, sepanjang kita meyakini



segala hal yang berkaitan dengan produk budaya kita, termasuk bahasa dan sastra Indonesia, yang layak dipromosikan untuk meraih pengakuan internasional.

Namun, masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Semasa hidupnya, Indonesianis terkemuka Ben Anderson pernah mengemukakan pertanyaan penting beberapa tahun lalu: mengapa sejak Hadiah Nobel Sastra diberikan pada tahun 1901 (117 tahun lalu), Asia Tenggara menjadi satu-satunya kawasan besar di dunia yang belum mendapatkan giliran meraih hadiah prestisius tersebut?

Anderson membahas pertanyaan itu dalam esainya yang menarik, “Yang Luput dari Penghargaan: Politik Penganugerahan Hadiah Nobel Sastra” ([www.sastraalibi.blogspot.com](http://www.sastraalibi.blogspot.com), diunduh pada 28 September 2018). Esai tersebut membahas berbagai kemungkinan perihal Hadiah Nobel Sastra, termasuk kemungkinan pilihan-pilihan subjektif dan selera penyelenggara. Untuk karya sastra dari kawasan Asia Tenggara, Anderson memiliki pendapat menarik yang perlu kita kaji lebih jauh. Menurut Anderson, tidak satu pun bahasa nasional di Asia Tenggara mempunyai aura transnasional. Faktor lainnya adalah keterbatasan penerjemahan berkualitas karya sastra ke dalam “bahasa-bahasa besar” dunia agar dibaca secara luas.

Dalam konteks Indonesia, secara khusus Ben Anderson mengambil contoh dua sastrawan besar Indonesia: Amir Hamzah dan Pramudya Ananta Toer. Keduanya memiliki karya yang luar biasa dan, pada zamannya, dapat bersaing dalam meraih Nobel Sastra. Hanya saja, semasa mereka hidup, karya-karya mereka belum mendapatkan sentuhan penerjemahan dengan kualitas yang diakui secara luas. Sementara itu, dalam kasus Pramudya, karya-karyanya sudah banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Peluang meraih Nobel Sastra pun luput karena hadiah tersebut hanya diberikan kepada sastrawan yang masih hidup.

“Satu alasan mengapa penulis-penulis besar Amerika Latin bisa mendapat Hadiah Nobel adalah adanya sekelompok penerjemah dwibahasa (Spanyol-Inggris) profesional kelas wahid yang dihormati secara luas. Asia Tenggara, sebagai sebuah kawasan, dan sebagai sekelompok negara yang berdiri sendiri-sendiri, tidak memiliki yang seperti ini,” kata Anderson.

Namun, benarkah bahasa Indonesia yang termasuk salah satu bahasa nasional di Asia Tenggara akan selamanya tidak memiliki aura transnasional seperti dikatakan Ben Anderson? Beberapa tahun belakangan ini terjadi perkembangan menarik, baik dari sastra Indonesia maupun dari perkembangan bahasa Indonesia sendiri. Mengutip penulis dan penerjemah Anton Kurnia (*Jawa Pos*, 9 September 2018, hlm. 6), perubahan peta perbukuan global, perkembangan penerbitan independen, revolusi digital, keajaiban internet, serta upaya-upaya yang lebih serius dan ajek dalam penerjemahan teks-teks sastra membuat pertukaran karya dan wacana menjadi lebih meluas dan melampaui batas-batas sekaligus amat intens.

Dalam konteks Indonesia, kemajuan pesat itu juga terasa dan tampak. Kini para penulis Indonesia telah mulai mampu menembus persaingan ketat di pentas-pentas dunia. Salah satunya lewat novel-novel Eka Kurniawan. Karya para penulis Indonesia juga mulai dilirik dalam ajang perbukuan internasional. Indonesia menjadi tamu kehormatan pada Pameran Buku Internasional Frankfurt, Jerman, 2015. Prestasi yang sama akan kembali diulangi tahun depan, saat Indonesia





menjadi *Market Focus Country* pada Pameran Buku Internasional London, Inggris, Maret 2019.

Perkembangan ini berdampak pada cara pandang kita dalam melihat posisi bahasa Indonesia. Sejak diikrarkan sebagai bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Pasal 36 UUD 1945, bahasa Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat. Bahasa Indonesia terbukti mampu mengemban fungsi sebagai sarana komunikasi modern dengan daya ungkap setara bahasa-bahasa besar lainnya. Hal ini tecermin dari mayoritas sastrawan Indonesia yang setia menggunakan bahasa nasional. Fakta bahasa modern ini juga tecermin dalam penggunaan bahasa Indonesia di bidang lain, seperti dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta teknologi dan seni.

Kondisi ideal kebahasaan kita, sebagaimana digariskan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009, sepatutnya mengikhtiarkan terjadinya keseimbangan antara kebutuhan mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Perimbangan itu dapat dicapai lewat kesadaran kolektif atas ketiga bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah tersebut.

Seiring dengan kemajuan bangsa Indonesia di era global, peran Indonesia dalam pergaulan antarbangsa juga makin penting. Ada sejumlah alasan untuk optimis pada peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sekarang ini pengajaran bahasa Indonesia di sejumlah negara justru tengah menemukan momentum terbaiknya. Bahasa Indonesia hingga saat ini telah diajarkan kepada orang asing di berbagai lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, saat ini tercatat tidak kurang dari 45 lembaga penyelenggara pengajaran BIPA, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga kursus. Pengajaran BIPA di luar negeri telah dilakukan oleh sekitar 130 lembaga yang tersebar di 36 negara. Lembaga-lembaga itu terdiri atas perguruan tinggi, pusat-pusat kebudayaan asing, KBRI, dan lembaga-lembaga kursus (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id> diunduh pada 1 Oktober 2018).

Di Taiwan pengajaran bahasa Indonesia mendapat efek positif dari kebijakan Pemerintah Taiwan yang menerapkan *The New Southbond Policy*. Kebijakan baru ini resmi diluncurkan pada 5 September 2016 untuk meningkatkan kerja sama dan pertukaran berbagai kepentingan, termasuk ekonomi-perdagangan dan beasiswa pendidikan, antara Taiwan dan 18 negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Australasia. Salah satu implikasi dari kebijakan baru ini adalah berkembangnya penyelenggaraan mata kuliah bahasa dan budaya Indonesia pada sejumlah perguruan tinggi di Taiwan.

Pengajar kajian internasional Universitas Kanda di Jepang, Funada Kyoko, mengungkapkan, di Jepang ada 75 dari 800 perguruan tinggi yang mengajarkan bahasa Indonesia. Funada Kyoko melihat peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Hal itu bisa dimulai dari kawasan ASEAN dan diiringi upaya menjadikan ekonomi Indonesia kukuh (*Kompas*, 18/2/2017).

Pengajaran bahasa Indonesia di negara-negara ASEAN juga menemukan momentumnya dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jumlah perguruan tinggi yang mengajarkan bahasa Indonesia di Thailand terus berkembang. begitu pula di Vietnam. Bahkan, sejak 2009 Pemerintah Daerah Ho Chi Minh City, Vietnam, sudah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua.



Jadi, melalui sejumlah perkembangan menggembirakan tersebut, kita dapat masuk ke dalam tahapan yang lebih serius, yaitu menyiapkan strategi menyebarkan bahasa dan sastra Indonesia melalui pengajaran BIPA dan ekspedisi budaya.

## **2. Pengajaran Bipa dan Ekspedisi Budaya**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk penyebaran bahasa dan sastra Indonesia melalui pengajaran BIPA, baik oleh pemerintah, organisasi profesi (APPBIPA), maupun perorangan (masyarakat). Badan Bahasa melalui Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) secara berkala melakukan pengiriman tenaga pengajar BIPA ke luar negeri. Pada tahun 2015 telah dikirim para pengajar BIPA sebanyak 80 orang. Negara yang dituju adalah Vietnam, Laos, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Tiongkok, Jerman, Prancis, Myanmar, Timor Leste, Australia, Amerika Serikat, Filipina, Mesir, Maroko, dan Tunisia (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id> diunduh pada 29 Januari 2017).

Kegiatan pengiriman tenaga pengajar BIPA mulai dilakukan Badan Bahasa sejak berdirinya PPSDK. Pada tahun 2018 Badan Bahasa menargetkan ada 115 pengajar BIPA yang akan dikirim ke 19 negara untuk mengajar di 54 lembaga penyelenggara BIPA, dengan total pemelajar 10.600 orang asing (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id> diunduh pada 2 Oktober 2018). Seleksi dan pelatihan bagi pengajar BIPA telah dilakukan PPSDK bekerja sama dengan Afiliasi Pengajar dan Pegiat BIPA (APPBIPA).

Dari segi kuantitatif, peningkatan jumlah pengiriman pengajar BIPA ini menggembirakan. Namun, kita masih memiliki tugas mempersiapkan peningkatan kompetensi pengajar BIPA melalui pendidikan profesi guru BIPA, pembukaan program studi BIPA, dan sertifikasi guru BIPA. Ketiga program ini harus direncanakan dengan matang dan berkelanjutan sehingga pengajaran BIPA menjadi pengajaran berkualitas yang diakui secara luas. Tentu saja harus ada dukungan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Rintisan program-program tersebut harus seizin Kemenristekdikti.

Untuk meningkatkan kualitas pengajar BIPA, berbagai pelatihan telah dilakukan. Namun, hal tersebut tentu saja tidak cukup untuk diakui secara internasional. Dunia internasional akan selalu menuntut adanya sertifikat profesi bagi pengajar BIPA. Saat ini belum ada lembaga sertifikasi untuk pengajar BIPA (LSP BIPA). Para pengajar BIPA masih berbekal ijazah sarjana, magister, atau doktor dengan berbagai latar belakang pendidikan. Keberagaman ini sudah seharusnya segera diselesaikan dengan berbagai program tadi (kualifikasi pendidikan BIPA atau LSP BIPA) sehingga profesionalisme pengajar menjadi jelas dan diakui negara lain.

Selain pengajaran BIPA, ekspedisi budaya menjadi satu terobosan yang harus dilakukan. Setakat ini para pengajar BIPA sudah banyak memasukkan unsur budaya dalam pengajarannya. Buku-buku BIPA yang diterbitkan PPSDK dan perorangan secara sadar mengintegrasikan pengenalan budaya dalam materi keterampilan berbahasa. Jika merujuk pada Koentjaraningrat (1980), unsur-unsur budaya dapat diklasifikasikan atas tujuh klasifikasi, yakni bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.



Pada tahun 2015 penulis melakukan analisis kebutuhan kepada dua belas siswa BIPA tingkat pemula (A1) dan tiga belas pengajar BIPA tentang perlu atau tidaknya materi budaya diberikan. Dari kuesioner yang terkumpul diperoleh data sebagai berikut. Data jawaban atas pertanyaan *Materi apakah yang ingin dikuasai siswa?* adalah sebanyak 100% jawaban berupa keinginan menguasai keterampilan berbahasa Indonesia. Jawaban atas pertanyaan *Apakah siswa BIPA membutuhkan informasi tentang budaya di Indonesia?* adalah sebanyak 92,3% membutuhkannya dan 7,7% menyatakan tidak membutuhkannya. Data jawaban atas pertanyaan *Materi kebudayaan apa yang dibutuhkan siswa BIPA?* adalah sebanyak 69,2% sangat membutuhkan materi ide/nilai-nilai sopan santun masyarakat Indonesia dan 46% sangat membutuhkan materi tentang aktivitas masyarakat/kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia dan kebudayaan fisik (candi, rumah adat, dan lain-lain). Jika dikaitkan dengan teori Koentjaraningrat tampaknya masalah organisasi sosial menjadi hal yang lebih dominan dibutuhkan.

Selanjutnya, analisis kebutuhan yang dilakukan kepada tiga belas pengajar BIPA menghasilkan data berikut. Data jawaban dari pertanyaan *Apakah siswa BIPA tingkat pemula menurut pengajar membutuhkan informasi tentang budaya di Indonesia?* adalah semua pengajar menjawab setuju. Rinciannya adalah 75% pengajar menyatakan setuju karena materi budaya dibutuhkan agar siswa BIPA dapat beradaptasi dengan masyarakat Indonesia (tidak terjadi keterkejutan budaya); 12,5% pengajar setuju dengan alasan untuk menambah pengetahuan siswa asing soal budaya Indonesia; dan 12,5% pengajar setuju karena siswa asing tertarik dengan budaya Indonesia sehingga materi budaya menjadi materi yang harus dibahas juga di dalam pembelajaran.

Data jawaban pengajar tentang *Materi kebudayaan yang dibutuhkan siswa BIPA tingkat A1* adalah 100% pengajar menyatakan siswa BIPA membutuhkan materi ide/nilai-nilai hidup sopan santun masyarakat Indonesia. Sebanyak 100% pengajar menyatakan siswa BIPA membutuhkan materi aktivitas masyarakat/kebiasaan masyarakat Indonesia, pengetahuan kebudayaan fisik seperti candi, dan rumah adat. Lalu, sebanyak 37,5% pengajar sangat membutuhkan informasi tentang kebudayaan fisik: candi, rumah adat, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang terbatas tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa dan pengajar sama-sama berpendapat materi budaya penting bagi siswa BIPA. Materi yang paling diperlukan adalah materi ide/nilai-nilai sopan santun masyarakat Indonesia, aktivitas masyarakat/kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia, dan terakhir materi kebudayaan fisik (candi, rumah adat, dan lain-lain).

Menurut Suyitno (2005), pengembangan materi ajar BIPA harus memperhatikan empat aspek: (1) tingkat kesulitan, (2) tingkat produktivitas, (3) tingkat kompleksitas, dan (4) tingkat keberterimaan. Berpegang pada pendapat Koentjaraningrat, budaya yang dapat diberikan di luar bahasa adalah sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Para penulis materi ajar BIPA atau pengajar BIPA dapat memilih unsur budaya tersebut untuk masuk dalam materi ajar BIPA secara bergradasi.

Jika membicarakan aspek *tingkat kesulitan*, pengajar dapat memulai dari budaya sehari-hari yang mudah dilihat atau dikerjakan siswa BIPA. Kebiasaan



sehari-hari yang dilakukan masyarakat di sekitar termasuk dalam kategori mudah. Mulai dari budaya memberi salam, menyapa, berkenalan, permisi, dan minta maaf. Dari sudut pandang aspek *produktivitas*, budaya berupa ide/nilai-nilai sopan santun masyarakat Indonesia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering dilakukan oleh masyarakat sangat perlu diberikan kepada siswa BIPA. Kebiasaan orang Indonesia berbasa-basi, kebiasaan makan dengan tangan di beberapa daerah, atau kebiasaan duduk bersila adalah beberapa contoh kebiasaan produktif yang dapat diinformasikan.

Untuk aspek *kompleksitas*, hal ini berhubungan erat dengan tingkat kesulitan yang telah dibicarakan sebelumnya. Misalnya, materi budaya suku Batak yang sangat khas dalam memandang kekerabatan dan hubungan pernikahan tentu lebih kompleks dibandingkan materi tentang kata sapaan kekerabatan secara umum yang dilakukan orang Indonesia. Dengan demikian, materi sapaan kekerabatan pada suku Batak mungkin bisa diberikan pada pelajar asing tingkat madya dan yang sedang belajar di Sumatra Utara.

Dalam hal aspek tingkat *keberterimaan*, pengajar BIPA harus cermat menyeleksi materi budaya yang diberikan agar sesuai dengan konteks tempat siswa belajar. Jika siswa belajar BIPA di luar negeri dan kita tidak tahu apakah dia akan bekerja atau studi di mana nantinya, budaya (ide/nilai-nilai sopan santun masyarakat Indonesia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia) yang diberikan hendaklah yang umum berlaku di Indonesia (budaya *mainstream*). Budaya ini berlaku umum dan biasa dilakukan masyarakat Indonesia secara luas. Harapannya adalah jika siswa tersebut pergi ke Indonesia, tidak akan terjadi kesalahpahaman budaya.

Contoh sederhana: siswa BIPA belajar di negaranya lalu diberikan muatan ide/nilai-nilai sopan santun masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Jawa Tengah, padahal dia akan tinggal di Jakarta. Masyarakat di Jawa Tengah jika mengatakan “permisi” saat melalui satu gang kecil pasti akan bersikap sedikit membungkuk sambil memosisikan jempolnya menyamping. Hal ini tidak biasa dilakukan orang di Jakarta. Kemungkinan siswa tersebut akan mengalami keterkejutan budaya saat bekerja di Jakarta.

Menurut penulis, budaya lokal tempat siswa BIPA belajar saat di Indonesia perlu diperkenalkan. Siswa asing yang belajar di Sumatra Barat perlu dikenalkan pada sapaan *uda* dan *uni* yang mengacu pada kakak laki-laki dan perempuan di daerah. Mereka yang belajar di daerah Jawa Barat diperkenalkan sapaan khas Jawa Barat (*teteh* untuk kakak perempuan dan *aa'* untuk kakak laki-laki). Bukan hanya masalah bahasa yang diperkenalkan, melainkan juga unsur nonlinguistik yang mengiringinya. Contohnya adalah *gesture* saat berkenalan, saat bertegur sapa, atau saat berkomunikasi di setiap daerah memiliki kebiasaan khas. Ketika hal ini diinformasikan dalam kelas, akan bermanfaat bagi siswa untuk beradaptasi dengan masyarakat setempat.

Pengajaran bahasa, sastra, dan budaya tersebut tidak selalu diajarkan di dalam kelas. Banyak metode yang dapat digunakan guru agar siswa BIPA tertarik belajar. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melalui ekspedisi budaya. Ekspedisi budaya dalam konteks ini tidak hanya melakukan perjalanan ke suatu tempat wisata budaya. Namun, hal itu lebih difokuskan pada memberi pengalaman budaya kepada para siswa BIPA dalam bentuk konkret dengan “teknik celup” (membuat siswa berada langsung dalam suatu situasi budaya).



Misalnya, pada saat upacara perkawinan atau upacara keagamaan, siswa BIPA diminta hadir dan menyaksikannya. Penulis yakin hal ini sudah sering dilakukan para pengajar BIPA yang paham betapa berharganya pengalaman langsung dibandingkan hanya membaca teks tentang hal tersebut.

Menurut Richard dan Amato (2010), orang belajar bahasa asing memiliki berbagai tujuan sebagai berikut.

1. Tujuan integratif adalah saat para siswa ingin: a) dapat berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia atau dalam negeri sendiri yang berbicara bahasa target; atau b) bertahan hidup di budaya lain di mana bahasa target adalah bahasa utama yang digunakan.
2. Tujuan instrumental adalah saat siswa ingin: a) melakukan perjalanan, belajar, atau bekerja di negara lain di mana bahasa target adalah bahasa utama yang digunakan; b) mempelajari bidang tertentu atau mendapatkan pekerjaan dalam lingkungan lokal mereka sendiri yang mengharuskan mereka menjadi bilingual, atau c) dapat memenuhi persyaratan kelulusan untuk pindah ke tingkat studi yang lebih tinggi.
3. Tujuan personal adalah saat siswa merasa bahwa belajar bahasa lain adalah pengetahuan yang menguntungkan dan memperkaya wawasannya karena memberikan perspektif baru yang menarik.

Menurut Richard dan Amato, para siswa juga mempunyai kemungkinan belajar bahasa asing dengan kombinasi tujuan-tujuan tersebut.

Dalam konteks pembelajaran BIPA, para siswa asing memiliki kombinasi tujuan-tujuan tersebut. Tujuan tersebut tentunya menjadi perhatian para pengajar atau penyelenggara program BIPA. Tujuan yang berbeda akan berdampak pada silabus dan materi yang disiapkan. Materi bahasa, sastra, dan budaya tentu harus diseleksi sesuai kebutuhan dan memperhatikan empat aspek tadi.

### **3. Faktor Pendukung**

Sebenarnya, Badan Bahasa dan para pengajar BIPA memerlukan dukungan pihak lain untuk menjadikan penyebaran bahasa dan sastra Indonesia ini lebih berhasil, yaitu pihak industri kreatif. Bahasa Indonesia akan lebih memiliki magnet ketika industri kreatif kita seperti film, drama televisi, animasi, dan industri musik Indonesia menembus kancah dunia. Kita bisa berkaca pada keberhasilan Korea Selatan mengemas budayanya populernya (*pop culture*) menjadi fenomena dunia yang disebut *Korean wave* ('gelombang Korea' atau *hallyu* dalam bahasa Korea).

Menurut Suryani (2014), *Korean wave* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan produk kebudayaan populer Korea Selatan yang berhasil diekspor ke negara-negara lain di wilayah Asia, Eropa, maupun Amerika. Melalui musik, film, dan produk industri hiburan seperti drama televisi, *Korean wave* menjual kebudayaan Korea Selatan yang memadukan kehidupan tradisional dan modern. *Korean wave* tidak saja sebatas berhasil memasarkan budaya Korea Selatan, tetapi juga mampu memasarkan produk-produk komersial dan pariwisata Korea Selatan kepada publik di berbagai negara. Dalam kasus ini, *Korean wave* bukan lagi sekadar transfer budaya lintas-negara atau perluasan industri hiburan, melainkan telah menjadi instrumen 'kuasa lunak' (*soft power*) dalam mencapai tujuannya, yaitu memperoleh keuntungan ekonomi.

Nye, Jr. dalam Suryani (2014) menjabarkan bahwa *soft power* suatu negara didasarkan pada tiga sumber utama: kebudayaan (*culture*) yang membuat negara



tersebut menarik bagi pihak lain; nilai politik (*political values*) yang dianut negara tersebut; dan kebijakan luar negeri (*foreign policies*) yang membuat negara tersebut memiliki legitimasi dan otoritas moral. Kebudayaan sebagai salah satu sumber utama *soft power* dibagi menjadi dua jenis, yakni budaya adiluhung (*high culture*), seperti seni, sastra, dan pendidikan yang menarik perhatian elite tertentu, serta budaya populer (*pop culture*) yang berfokus pada produksi hiburan massal (*mass entertainment*).

Kesuksesan *Korean wave* juga berdampak positif pada peningkatan minat belajar bahasa Korea di luar negeri. Fakta ini pernah dilaporkan Matt Pickles dalam saluran publik Britania Raya, BBC. Pickles menulis artikel berjudul “*K-pop drives boom in Korean language lessons*” (<https://www.bbc.com/news/business/>, 11 Juli 2018).

Menurut artikel tersebut, menduniannya popularitas musik populer Korea (K-Pop) turut berkontribusi pada peningkatan minat belajar bahasa Korea di berbagai negara, antara lain AS, Kanada, Thailand, dan Malaysia. Situs penyedia pembelajaran bahasa, Duolingo, tahun lalu baru merilis kursus bahasa Korea. Dalam waktu singkat, program belajar bahasa Korea itu diminati 200.000 orang.

Terjadi peningkatan minat belajar bahasa Korea sebesar 14% pada universitas-universitas AS sepanjang 2013—2016. Padahal, bahasa-bahasa lain mengalami penurunan jumlah peminat. Statistik terakhir mencatat jumlah 14.000 mahasiswa pembelajar bahasa Korea di AS. Bandingkan saat dua dekade sebelumnya, hanya 163 mahasiswa tertarik belajar bahasa tersebut.

Padahal, meminjam istilah Ben Anderson, bahasa Korea pun terbilang tidak memiliki aura transnasional karena hanya menjadi bahasa warga di Semenanjung Korea (Korea Selatan dan Korea Utara). Sementara itu, cakupan bahasa Indonesia secara geografis lebih luas dibandingkan dengan bahasa Korea.

Seperti kesuksesan Korea memopulerkan produk budaya dan bahasanya, Indonesia pun dapat melakukan hal yang sama. Dua tahun lalu penulis bertemu para pengajar bahasa Melayu dari Malaysia dan Singapura dalam satu kegiatan pelatihan. Para pengajar bahasa Melayu tersebut dengan antusias bercerita tentang salah satu sinetron Indonesia yang mereka gandrungi. Mereka bercerita dengan lancarnya alur cerita sinetron tersebut hingga hafal pula nama para pemainnya. Penulis berharap, suatu hari nanti budaya pop Indonesia pun dapat menembus batas, tidak hanya ke negara tetangga dekat kita, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei.

Kita harus berani bermimpi suatu saat nanti akan ada “*Indonesian wave*” seperti halnya *Korean wave* yang mampu menembus batas-batas negara nonbahasa Melayu. Tidak bisa tidak, pemerintah harus membuat berbagai kebijakan yang berdampak kepada *soft power* seperti halnya *Korean wave*. Keberhasilan pertunjukan seni budaya Indonesia dalam upacara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018 yang dipuji negara lain, menjadi salah satu indikator bahwa kita juga mampu meraih apresiasi internasional. Sudah saatnya produk bahasa dan budaya Indonesia mendunia.

## **PENUTUP**

Penyebaran bahasa dan sastra Indonesia melalui pengajaran BIPA dan ekspedisi budaya akan berhasil jika didukung berbagai komponen. Komponen tersebut dapat dikategorikan atas komponen pengajaran dan nonpengajaran.



Komponen pengajaran tentunya menjadi tugas para pengajar dan pegiat BIPA untuk terus meningkatkan mutunya. Para pengajar BIPA harus diberi kesadaran bahwa mereka bukan hanya sekadar mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia. Mereka adalah duta bahasa dan budaya Indonesia. Organisasi profesi APPBIPA harus bersinergi terus dengan pemerintah (Badan Bahasa) dan pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan berbagai program peningkatan mutu tersebut.

Di sisi lain, ada faktor nonpengajaran yang harus segera digarap, yaitu faktor kebijakan yang mendukung terciptanya “gelombang Indonesia”. Gelombang tersebut harus diperjuangkan bersama oleh seluruh pihak terkait. Pemerintah dapat mendukung dengan memunculkan berbagai kebijakan yang membantu budaya Indonesia dapat lebih dikenal dunia. Penulis yakin, produk budaya seperti film, drama televisi, dan animasi, jika mendapat dukungan yang luar biasa dari pemerintah akan meraih reputasi internasional dan berdampak pada peningkatan jumlah orang asing yang ingin mempelajari bahasa dan budaya Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, Ben. (2013). “*The Unrewarded: Notes on the Nobel Prize for Literature*”, *New Left Review* 80, diterjemahkan Ronny Agustinus di [www.sastraalibi.blogspot.com](http://www.sastraalibi.blogspot.com), (diunduh pada 28 September 2018).
- Koentjaraningrat. (1980). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kurnia, Anton. (9 September 2018). “Sastra yang Melampaui Tapal Batas”. *Jawa Pos*. Rubrik Budaya hlm. 6.
- Muliastuti, Liliana. (2017). “Budaya Indonesia dalam Pengajaran BIPA”. *Makalah*. Dalam: Seminar Himpunan Peneliti Indonesia Seluruh Jepang ke-48 di Tenry University, 11 November 2017.
- Pusat Bahasa. (2010). *Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Kemendiknas.
- Richard, Patricia A. dan Amato. (2010). “Putting It All Together: Some Practical Issues,” *Making It Happen From Interactive to Participatory Language Teaching: Evolving Theory and Practice Fourth Edition*. London: Pearson Longman.
- Siregar, Bahren Umar. (2011). *Peran Organisasi Profesi dalam Perencanaan Bahasa dalam Risalah Simposium Internasional Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Suryani, Ni Putu Elvina. *Korean Wave Sebagai Instrumen Soft Power untuk Memperoleh Keuntungan Ekonomi Korea Selatan*. Diunduh dari [global.ir.fisip.ui.ac.id](http://global.ir.fisip.ui.ac.id). Diakses pada 1 Oktober 2018.
- Suyitno, Imam. (2005). *Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, Teori, Strategi, dan Aplikasi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Grafika Indah.
- “Internasionalisasi Terkendala, Bahasa Indonesia diminati di Luar Negeri tetapi pengajar masih Kurang”. (*Berita*). *Kompas*, 18 Februari 2017, hlm. 12. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id> (diunduh pada 29 Januari 2017). <https://www.bbc.com/news/business/> (diunduh pada 11 Juli 2018).



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 4 Kelompok 7**

Pembicara : Dr. Liliana Muliastuti  
Judul Makalah : “Penyebaran Bahasa dan Sastra Indonesia melalui BIPA dan Ekspedisi Budaya”  
Hari, Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2018  
Pukul : 13.45--15.15  
Moderator : Dony Setiawan, S.S., M.Pd.  
Pencatat : 1. Septimariani  
2. Vita Luthfia Urfa

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. “Perencanaan bahasa dilakukan oleh Badan Bahasa dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan” adalah bunyi Pasal 44 UU Nomor 24 Tahun 2009.
2. Sastra Asia Tenggara tidak mendapat hak istimewa.
3. Keterbatasan penerjemahan harus dikembangkan.
4. Kongres bahasa dapat memperkenalkan hasil karya bangsa Indonesia.
5. Pengajaran BIPA telah dilakukan di 130 negara.
6. Minat orang makin banyak untuk belajar bahasa Indonesia.
7. Di Jepang ada 75 dari 800 perguruan tinggi yang menggunakan pelajaran bahasa Indonesia.
8. SMK di Thailand mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia.
9. Pengajaran BIPA masih memiliki beberapa PR.
10. PR segi kuantitatif adalah peningkatan jumlah pengiriman guru BIPA dan PR dari segi kualitatif adalah adanya sertifikat guru BIPA.
11. Guru BIPA harus menjadi tenaga profesional.
12. Tujuan siswa belajar bahasa Indonesia dari segi budaya adalah untuk memperkaya wawasan. Melalui industri kreatif, misalnya melalui animasi dan film, diharapkan dapat menarik siswa untuk belajar bahasa Indonesia.
13. Program belajar bahasa Korea diminati oleh 200.000 orang.
14. Kita harus berani bermimpi untuk menembus batas-batas negara dan harus bersinergi dengan para pemangku kepentingan.
15. Pengajaran BIPA dan sastra Indonesia melalui pengajaran bahasa Indonesia.

**Isu-Isu Penting:**

Sertifikat guru BIPA harus dibuat untuk tenaga pengajar BIPA yang akan mengajar di luar negeri. Sertifikat diberikan secara resmi dari instansi pemerintah.





#### 4. Pendidikan Bahasa Indonesia pada Zaman Dahulu dan Masa Kini di Jepang

##### PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA PADA ZAMAN DAHULU DAN MASA KINI DI JEPANG

*History and Present State of Indonesian Language Instruction in Japan*

Kyoko Funada

Kanda University of International Studies, Japan

kfunada@kanda.kuis.ac.jp

##### Abstrak

Sekolah bahasa telah didirikan di Jepang selama lebih dari satu abad. Bahasa Indonesia telah memiliki tempatnya sendiri sejak awal. Pada saat itu, Jepang tidak hanya mempelajari bahasanya saja secara terpisah, tetapi juga berusaha untuk memperdalam wawasan mereka dengan mempelajari beragam budaya di Indonesia. Selama periode Edo (1603—1868), beberapa orang Jepang menjelajahi negara-negara Melayu, lalu diketahui bahwa daftar kosakata Indonesia dibuat dengan mewawancarai salah satu pelaut tersebut. Orang Jepang terus mempelajari bahasa Indonesia melalui sekolah-sekolah dan tempat-tempat lain. Sebagai hasilnya, selama dan setelah Perang Dunia II, kamus-kamus bahasa Indonesia dikompilasi dan bahan-bahan mengenai Indonesia terus diterbitkan hingga hari ini. Pada 1960-an banyak lembaga pendidikan tinggi mulai mendirikan departemen bahasa Indonesia dan jurusan studi Indonesia dan beberapa lembaga mulai menawarkan kelas bahasa Indonesia sebagai pilihan. Saat ini sistem pengajaran bahasa Indonesia terus berkembang. Dalam makalah ini digunakan contoh sistem pembelajaran di Program Studi Internasional di Universitas Kanda. Hasil penelitian ini digunakan untuk menginspeksi apakah cara pengajaran bahasa Indonesia di Jepang yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia dapat membantu orang Indonesia makin mencintai bahasa nasional mereka sendiri. Metodologi yang digunakan meliputi publikasi dan studi lapangan: data yang dikumpulkan ada di berbagai publikasi. Selain itu, dalam penelitian ini digunakan kuesioner dan wawancara, serta didasarkan pada pengalaman mengajarkan bahasa Indonesia di Jepang selama tiga puluh tahun. Simpulan dari makalah ini adalah pengajaran bahasa Indonesia di Jepang akan terus berkembang di masa depan.

**Kata-kata kunci:** organisasi pendidikan, akomodasi bahasa, dan bahasa pilihan

##### Abstract

*Language schools have been established in Japan for more than a century. The Indonesian language has had its own place from the very beginning. At the time, Japanese did not merely study the language in isolation, but attempted to deepen their insight by studying the diverse cultures of Indonesia. During the Edo period (1603-1868), some Japanese roved about the countries within the Malay language sphere, and it is known that an Indonesian vocabulary list was drawn up by interviewing one of these sailors. Japanese continued to study Indonesian in schools and other venues, and as a result, during and after World War II, Indonesian dictionaries were compiled, and materials concerning Indonesia continue to be published to this day. In the 1960's, many institutions of higher learning began to establish Indonesian language departments and Indonesian*



*studies majors, and some institutions began to offer Indonesian language classes as options. Today, systems of Indonesian language instruction continue to develop. By way of clarification, this paper raises the example of the system at Kanda University of International Studies. This paper inspects ways in which the state of Indonesian language instruction in Japan as it pertains to Indonesian society might help Indonesians love their own national language more and more. The methodologies employed include publications and field studies; collected data are in various publications. In addition, the paper has used questionnaires, interviews and thirty years of experience in Indonesian language instruction in Japan. This paper concludes that Indonesian language instruction in Japan will continue to develop in future.*

**Keywords:** *educational organization, language accommodation, choice languages*

## **PENDAHULUAN**

Hubungan bilateral Indonesia-Jepang sudah lama berjalan dengan baik. Pada awal abad ke-18 orang Jepang sudah bermigrasi ke Indonesia. Pada tahun 1764 perahu yang membawa pelaut bernama Magotaro terdampar di Pulau Mindanao. Beruntung akhirnya Magotaro selamat. Oleh bajak laut, Magotaro dijual dan dijadikan budak di Banjarmasin sampai pada tahun 1791. Setelah itu, dia dibebaskan sehingga akhirnya dia bisa kembali ke Jepang.

Magotaro diwawancarai oleh cendekiawan, Okikatsu Aoki, karena pada waktu itu Jepang tutup negara<sup>8</sup> sehingga pengetahuan atau berita-berita tentang luar negeri hampir tidak terdengar di Jepang. Hal tersebut membuat para peneliti Barat “haus” akan pengetahuan dan berusaha menghimpun data dari berbagai sumber. Dengan gigih Aoki membuat daftar kata bahasa Melayu-Jepang. Melalui daftar itulah orang Jepang mengenal bahasa Melayu untuk pertama kalinya. Hal itu dijelaskan dalam tulisan Okikatsu Aoki.<sup>9</sup> Dalam tulisan tersebut ditunjukkan bahwa lebih dari dua ratus tahun bahasa Indonesia/Melayu sudah masuk ke Jepang.

Dalam kurun waktu dua ratus tahun terakhir animo masyarakat Jepang terhadap pendidikan bahasa Indonesia makin meningkat. Gejalanya mulai tampak sejak tahun 1980-an.

Dalam makalah ini penulis berusaha menganalisis kecenderungan ketertarikan orang-orang Jepang terhadap bahasa Indonesia dan angka-angka/persentase mengenai pendidikan bahasa Indonesia masa kini. Untuk itu, penulis menghimpun data melalui berbagai pustaka, mengadakan wawancara, dan menyebarkan angket.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Sejarah Pendidikan Bahasa Indonesia**

Pendidikan Bahasa Indonesia di Jepang secara resmi dimulai sejak seratus tahun yang lalu. Namun, berdasarkan data sebenarnya, masyarakat Jepang sudah mengenalnya sejak tahun 1700-an.

Pemerintah Shogun Tokugawa (Zaman Edo) mulai tutup negara dari tahun 1639 sampai dengan 1854 karena khawatir agama Kristen akan masuk ke Jepang.

---

<sup>8</sup> Tutup negara dilakukan sejak 1639 hingga 1854 waktu zaman Edo (Shogun Tokugawa) kecuali Belanda dan Cina di Nagasaki.

<sup>9</sup> Okikatsu Aoki, *Nankai Kibun*, 1820.



Selama kurun waktu tersebut, orang Jepang tidak boleh bepergian ke luar negeri dan sebaliknya. Orang asing tidak boleh masuk ke Jepang, selain orang Belanda (Hindia Belanda) dan orang Cina. Satu-satunya pelabuhan yang dibuka adalah Pelabuhan Dejima di Kota Nagasaki, Pulau Kyushu. Di sanalah para pedagang berkebangsaan Belanda dan Cina membawa barang-barang khas negara mereka, memperkenalkan kebudayaan, dan membagi pengetahuan mereka yang belum diketahui orang Jepang.

Oleh karena itu, banyak cendekiawan dan peneliti Jepang berkumpul di Nagasaki untuk mempelajari/meneliti hal-hal baru yang mereka dapatkan dari para pedagang Belanda dan Cina, terutama yang berkaitan dengan obat-obatan dan bidang kedokteran lainnya.

Pada zaman itu, Magotaro, yang telah disebutkan sebelumnya, kembali ke Jepang. Kepulangan Magotaro tidak disia-siakan oleh para cendekiawan, seperti Okikatsu Aoki. Aoki mendekati Magotaro untuk menghimpun pengetahuan yang diperoleh Magotaro dari luar negeri.

Setelah membuka negara Jepang pada tahun 1854 dan pemerintah Shogun Tokugawa tutup pada tahun 1868, Jepang memasuki zaman peradaban baru, yaitu zaman Meiji atau yang dikenal sebagai Restorasi Meiji.

Pada awal zaman Meiji, situasi politik Jepang tidak stabil, tetapi pada tahun-tahun berikutnya makin kondusif. Tiga puluh tahun setelah Restorasi Meiji (1898) pemerintah mendirikan sekolah bahasa di Tokyo. Bahasa yang diajarkan ketika itu terbatas pada bahasa Inggris. Sepuluh tahun kemudian (1908) barulah pemerintah mengembangkan sayap dan mulai membuka Jurusan Bahasa Melayu<sup>1</sup>. Alasan dibukanya jurusan tersebut adalah karena pemerintah sudah mendapat banyak data tentang Indonesia yang kaya akan sumber alamnya.

Pada awalnya peminat bahasa Melayu tidak terlalu banyak. Pada tahun pertama (1908) hanya tercatat 28 peminat. Pada tahun 1929 peminatnya melonjak hampir dua kali lipat menjadi 57 orang. Pada tahun 1938, lebih menggembirakan, peminatnya menjadi 115 orang. Sekolah bahasa tersebut di atas sekarang dikenal dengan nama Universitas Bahasa Asing Tokyo (*Tokyo University of Foreign Studies*). Pada tahun-tahun berikutnya mulai bermunculan sekolah-sekolah bahasa, baik di Tokyo maupun di luar Tokyo. Pada tahun 1900 muncul sekolah bahasa yang sekarang menjadi Universitas Takushoku (Takushoku University), pada tahun 1921 di Osaka muncul sekolah bahasa yang sekarang menjadi Oosaka University, pada tahun 1927 di Tenri muncul sekolah bahasa yang sekarang menjadi Tenri University, dan tahun 1941 di Tokyo muncul sekolah bahasa yang sekarang menjadi Asia University.

Pada zaman Meiji masyarakat Jepang mulai menyadari begitu pentingnya posisi strategis/keberadaan Indonesia (yang ketika itu disebut “Melayu”). Sangat beralasan apabila pemerintah Jepang ketika itu berusaha mengakomodasi Jurusan Bahasa Melayu di sekolah-sekolah bahasa.

Pada masa PD II, pada tahun 1942, pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Komisi Bahasa Indonesia. Komisi tersebut berusaha menyempurnakan kosakata dan tata bahasa Indonesia yang sudah dihimpun sejak beberapa tahun sebelumnya. Setelah Indonesia merdeka, S.T. Alisjahbana dkk., yang bekerja di Komisi Bahasa Indonesia semasa PD II, menerbitkan kamus dan buku tata bahasa.



## 2. Kamus Bahasa Indonesia

Sebagai sarana penunjang untuk mempelajari bahasa Indonesia, keberadaan kamus sangatlah penting. Sebelum PD II, Kamus Bahasa Indonesia mulai disusun di Jepang.

**Tabel 1**  
**Kamus Bahasa Indonesia di Jepang**

<b>Tahun</b>	<b>Nama Kamus</b>
1923	Kamus Bahasa Melayu-Nippon
1927	Kamus Bahasa Melayu Praktik
1938	Kamoes Bahasa Nippon-Indonesia
1938	Kamoes Baroe Bahasa Indonesia
1940	Kamus Bahasa Melayu-Jepun
1941	Kamus Standar Bahasa Melayu-Nippon
1942	Kamus Besar Bahasa Melayu
1942	Kamoes Baroe Bahasa Indonesia-Nippon
1943	Kamus Asia Timur
1943	Kamoes Bahasa Melajoe (Indonesia)~Nippon Jang Lengkap
1944	Kamoes Baroe Bahasa Djepang-Melajoe
1944	Kamoes Bahasa Melajoe Jang Paling Baroe
1963	Kamus Bahasa Indonesia-Djepang, Djepang-Indonesia
1964	Kamus Terbaru Bahasa Djepang-Indonesia
1977	Kamus Baru Indonesia-Jepang
1984	Kamus Baru Jepang-Indonesia
1988	Kamus Standar Bahasa Jepang-Indonesia
1988	Kamus Standar Bahasa Indonesia-Jepang
1994	Kamus Baru Bahasa Indonesia
2002	Kamus Kecil Indonesia-Jepang Mutakhir
2018	Kamus Bahasa Indonesia, Indonesia-Jepang

Dibuat oleh penulis, 2018

Di dalam kamus yang disusun sebelum atau semasa PD II terdapat penjelasan tentang Ejaan van Ophuijsen dan Ejaan Bahasa Melayu, tetapi yang digunakan adalah Ejaan Bahasa Melayu. Sementara itu, buku tata bahasa yang diterbitkan sebelum dan semasa PD II hampir seluruhnya menggunakan Ejaan van Ophuijsen.

Selain kamus-kamus yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa kamus yang juga diterbitkan, terutama kamus istilah.

Pada tahun 1950-an kamus bahasa baku tidak diterbitkan. Pada masa itu yang digunakan di Jepang adalah kamus R.J. Wilkinson (*Malay-English Dictionary*, 1957) dan kamus R.O. Winstedt (*An Unabridged Malay-English Dictionary*, 1953). Mengingat makin banyaknya orang Jepang yang memerlukan kamus, kamus bahasa Indonesia tetap diterbitkan pada masa itu.

## 3. Pendidikan Bahasa Indonesia Masa Kini

Hubungan Indonesia-Jepang meluas ke bidang politik, ekonomi, dan budaya kedua negara. Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling mendapat



perhatian kedua negara bahkan seolah menjadi “perekat” kedua negara. Sejak tahun 1980-an kerja sama kedua negara dalam bidang ekonomi telah saling menguntungkan.

Hal tersebut ditandai dengan masuknya lebih kurang 1.600 perusahaan Jepang ke Indonesia untuk menanamkan modal dan bekerja sama dengan perusahaan Indonesia.<sup>10</sup> Sekarang tercatat lebih kurang 20.000 orang Jepang tinggal di Indonesia. Wisatawan Jepang pun banyak yang berkunjung ke Indonesia. Mereka tertarik datang ke Indonesia, setelah melihat tayangan program televisi, terutama budaya masyarakat Bali.

## PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Pengajaran Bahasa Indonesia Masa Kini

Sekarang di Jepang terdapat lebih kurang 800 universitas, di samping perguruan tinggi non-universitas, seperti akademi. Dari jumlah tersebut terdapat 75 universitas<sup>11</sup> dan akademi yang mengakomodasi pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuh universitas dan dua akademi di antaranya memiliki Jurusan Bahasa Indonesia atau Program Studi Bahasa Indonesia. Selain itu, sebagai bahasa asing utama, bahasa Indonesia juga diajarkan sebagai pengantar dalam jurusan lain, misalnya Jurusan Hubungan Internasional. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pilihan di beberapa fakultas.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa pilihan dipelajari dua kali seminggu, durasi tatap muka adalah 90 menit, selama dua tahun. Sebagai bahasa utama pada jurusan bidang nonbahasa, biasanya pelajaran bahasa Indonesia diberikan tiga kali seminggu. Pada Jurusan Bahasa Indonesia atau Program Studi Bahasa Indonesia mahasiswa wajib mempelajarinya lima kali seminggu pada tingkat I dan II (semester 1–4). Mahasiswa tingkat III dan IV (semester 5–8) wajib mengambil dua mata kuliah per tahun, lalu ditawarkan mata kuliah bahasa Indonesia lanjut pilihan selama 5--6 kali seminggu.

**Tabel 2**  
**Sistem Pendidikan Bahasa Indonesia pada Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Bahasa Asing Kanda**

<b>Tingkatan</b>	<b>Durasi Pembelajaran</b>
Tingkat I	5 kali seminggu(sekali 90 menit) –225 jam
Tingkat II	5 kali seminggu–225 jam setahun
Tingkat III	2 kali seminggu (wajib)–90 jam setahun 5 kali seminggu (pilihan)–225 jam
Tingkat IV	2 kali seminggu (wajib)–90 jam setahun 5 kali seminggu (pilihan)–225 jam

Dibuat oleh penulis, 2018

Mahasiswa yang mengambil Jurusan Bahasa Indonesia atau Program Studi Bahasa Indonesia wajib mempelajari segala sesuatu tentang Indonesia, tidak hanya yang berkaitan dengan bahasa, misalnya yang berhubungan dengan sosial,

<sup>10</sup> Pada waktu itu belum ada nama “Indonesia”

<sup>11</sup> <https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn>



ekonomi, politik, sejarah, sastra, geografi, antropologi, agama, kebudayaan, serta kesenian.

Menurut pengamatan penulis, pendidikan bahasa Indonesia di jurusan/program studi bahasa Indonesia yang diterapkan di Jepang berbeda dengan BIPA yang sudah diterapkan di beberapa universitas di Indonesia. BIPA merupakan program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia (berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan) bagi orang asing, yang mempunyai kurikulum sendiri di luar fakultas. Lulusannya adalah setingkat diploma, bukan sarjana. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia di Jurusan atau Program Studi Bahasa Indonesia berbeda dengan BIPA. Dosen bahasa Indonesia di Jepang menyebutnya sebagai “pendidikan bahasa Indonesia di Jepang”. Mahasiswanya juga mempelajari mata kuliah lain, seperti politik, sejarah, dan budaya, di Jurusan/Program Studi Bahasa Indonesia.

## **2. Buku Pelajaran Bahasa Indonesia di Setiap Perguruan Tinggi**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) di Indonesia sudah menyusun buku *Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA)*. Banyak lembaga penyelenggara BIPA di Indonesia menggunakan buku pelajaran yang disusun oleh Badan Bahasa tersebut. Namun, ada juga lembaga yang menggunakan buku yang disusun oleh lembaga masing-masing. Demikian pula halnya di Jepang.

Kemampuan mahasiswa dalam menyerap bahasa asing di setiap universitas/ perguruan tinggi berbeda-beda. Oleh sebab itu, belum ada standar acuan yang mengatur penyelenggaraan dan pembelajaran bahasa Indonesia. Dosen di setiap universitas/perguruan tinggi membuat buku bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan kemampuan mahasiswanya.

### **a) Analisis Hasil Angket Tentang Kondisi Pendidikan Bahasa Indonesia di Jepang Pada Tahun 2017**

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di Jepang terdapat lebih kurang 800 universitas dan tujuh di antaranya mengakomodasi Jurusan atau Program Studi Bahasa Indonesia. Selain ketujuh universitas tersebut, lebih kurang 65 perguruan tinggi memiliki kelas bahasa Indonesia sebagai bahasa asing utama atau bahasa pilihan.

### **b) Perguruan Tinggi yang Mengisi Angket**

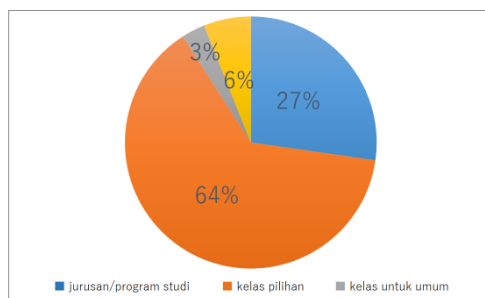
Pada tahun 1969 di Jepang dibentuk Himpunan Peneliti Indonesia Seluruh Jepang (HPISJ) yang beranggotakan para dosen pengajar bahasa Indonesia. Hampir semua dosen tetap di bidang pendidikan bahasa Indonesia di Jepang menjadi anggota HPISJ, meski ada pula dosen tidak tetap yang tidak menjadi anggota. Bidang penelitiannya, antara lain, mencakup pendidikan bahasa Indonesia, bahasa daerah, linguistik, sejarah, sosial, politik, kesenian, dan kebudayaan Indonesia.

HPISJ menyebarkan angket tentang pendidikan bahasa Indonesia di lingkungan universitas/perguruan tinggi pada tahun 2017. Tujuannya adalah diperolehnya hasil yang akurat mengingat pengisi angket merupakan anggota/dosen tetap pendidikan bahasa Indonesia.

Jumlah perguruan tinggi yang mengisi angket adalah sebanyak 23. Sementara itu, sekitar 45 perguruan tinggi tidak mengisi angket. Jika kelas

bahasa Indonesia di 45 perguruan tinggi itu digabungkan ke dalam kelas pilihan, hasil akhirnya akan sedikit berubah.

Hasil yang diperoleh dari penyebaran angket tersebut adalah sebanyak 9 jurusan/program studi dari 13 perguruan tinggi mengakomodasi kelas bahasa Indonesia sebagai bahasa pilihan. Sementara itu, kelas bahasa Indonesia untuk orang umum hanya ada 1. Hasilnya tampak seperti diagram berikut ini.



**Diagram 1 Perguruan Tinggi yang Mengisi Angket**

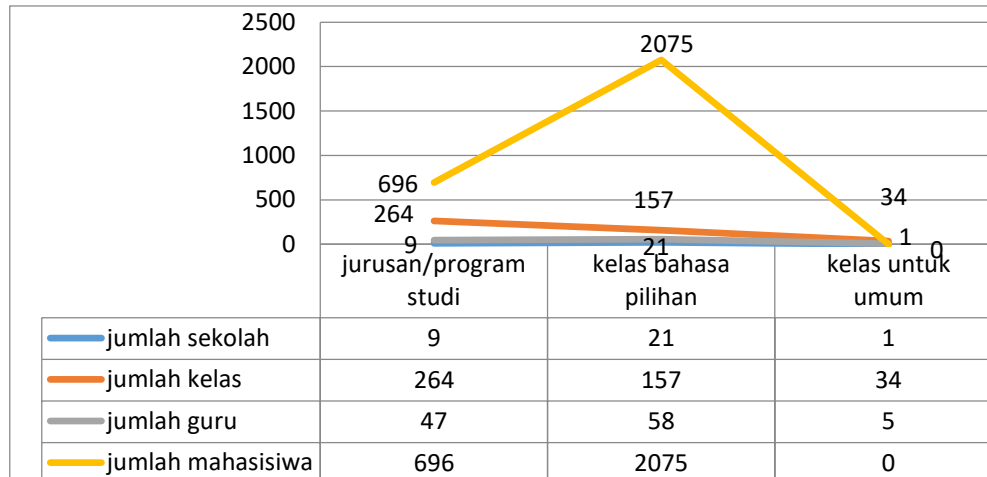
Sumber: HPISJ, 2017

**c) Kategori Kelas, Jumlah Dosen, Mahasiswa, dan Kelas**

Dalam setahun telah dibuka 264 kelas di sembilan perguruan tinggi yang mengakomodasi jurusan/program studi bahasa Indonesia.

Biasanya setiap jurusan/program studi bahasa Indonesia membuka 20 kelas untuk mahasiswa tingkat I dan II (semester 1—4; 5 kelas masing-masing). Sementara itu, untuk tingkat III dan IV disediakan 9—10 mata kuliah bahasa Indonesia. Di setiap universitas terdapat 5—7 dosen yang mengajar bahasa Indonesia. Di setiap universitas setiap tingkat terdiri atas 20 mahasiswa (rata-rata). Artinya, setiap universitas yang memiliki jurusan/program studi bahasa Indonesia menyediakan satu kelas yang berisi 20 mahasiswa untuk setiap tingkat dan dibantu 5—7 dosen/pengajar.

Sementara itu, dapat diketahui dari diagram di bawah ini bahwa di kelas pilihan, untuk memperoleh sistem kredit semester (SKS), mahasiswa harus mengikuti 2 kelas seminggu. Jika dikalkulasi, 21 universitas memiliki lebih kurang 80 kelas dengan kapasitas mahasiswa 2.075 mahasiswa yang dibantu oleh 58 dosen. Singkatnya, satu universitas menyediakan 4 kelas bahasa Indonesia sebagai bahasa pilihan dengan jumlah mahasiswa dalam satu kelas 25 orang. Perbandingan antara jumlah dosen dan mahasiswa adalah 1:37. Dari diagram di bawah ini bisa ditarik kesimpulan bahwa di jurusan/program studi bahasa Indonesia, hubungan antara mahasiswa dan dosen jauh lebih dekat daripada di kelas bahasa pilihan. Oleh karena itu, mahasiswa di jurusan/program studi bahasa Indonesia lebih mahir berbahasa Indonesia daripada mereka yang mengambil bahasa Indonesia pilihan. Jika dibandingkan jumlah kelas dengan jumlah mahasiswanya, bisa diketahui bahwa jumlah mahasiswa dalam satu kelas di universitas yang mengakomodasi kelas pilihan, jauh lebih banyak daripada universitas yang memiliki jurusan/program studi bahasa Indonesia.



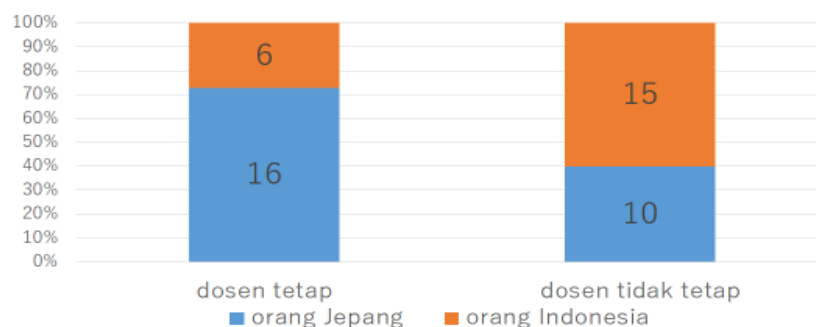
**Diagram 2**

**Kategori Kelas, Jumlah Dosen, Jumlah Mahasiswa, dan Jumlah Kelas**

Sumber: HPISJ, 2017

**d) Persentase Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap, Orang Jepang dan Orang Indonesia di Jurusan/Program Studi Bahasa Indonesia**

Di seluruh jurusan/program studi bahasa Indonesia di Jepang terdapat 47 dosen. Merujuk pada diagram di bawah ini dapat disimpulkan bahwa jumlah dosen tetap lebih sedikit daripada dosen tidak tetap. Mengingat, pelajaran bahasa memerlukan banyak tenaga pengajar, dibandingkan dengan mata kuliah lain. Terlebih lagi dalam satu kelas bahasa, jumlah mahasiswanya tidak boleh lebih dari 20. Oleh karena itu, tenaga pengajar tidak tetap sangat dibutuhkan. Dosen tidak tetap orang Indonesia jumlahnya 1,5 kali lipat daripada dosen orang Jepang karena setiap universitas menekankan kuliah berbicara, mendengar, dan menulis bahasa Indonesia oleh/melalui penutur asli (*native speaker*).



**Diagram 3 Persentase Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Orang Jepang dan Orang Indonesia**

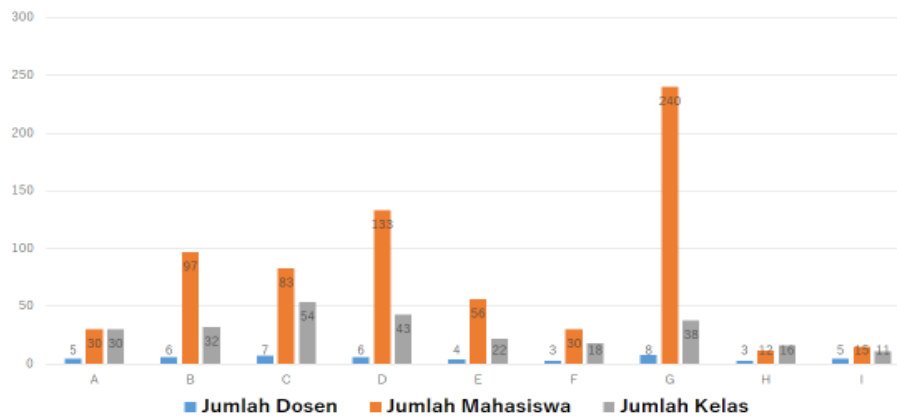
Sumber: HPISJ, 2017

**e) Jumlah Dosen, Mahasiswa, dan Kelas Menurut Setiap Jurusan/Program Studi Bahasa Indonesia**

Pada sembilan jurusan/program studi bahasa Indonesia perbandingan jumlah dosen, mahasiswa, dan kelasnya seperti di bawah ini.



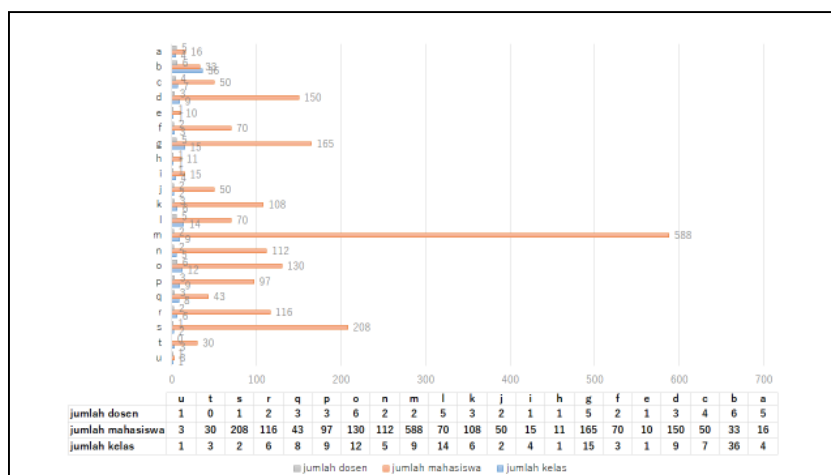
Di Sembilan universitas/akademi terdapat 47 dosen dan 696 mahasiswa. Artinya, satu universitas/akademi memiliki 5,2 dosen dan seorang dosen mengajar lebih kurang 15 mahasiswa.



**Diagram 4 Jumlah Dosen, Mahasiswa, Kelas Menurut Jurusan/Program Studi Bahasa Indonesia**  
Sumber: HPISJ, 2017

**f) Jumlah Dosen, Mahasiswa, Kelas Menurut Sekolah yang Memiliki Bahasa Indonesia Pilihan**

Di jurusan/program studi bahasa Indonesia terdapat 9 universitas/akademi dengan 47 dosen. Padahal, di kelas bahasa Indonesia pilihan jumlah universitas 21 dan 58 dosen. Dalam 1 universitas hanya memiliki 2,5 dosen. Pendek kata, di kelas bahasa pilihan, seorang dosen harus mengajar lebih kurang 36 mahasiswa.

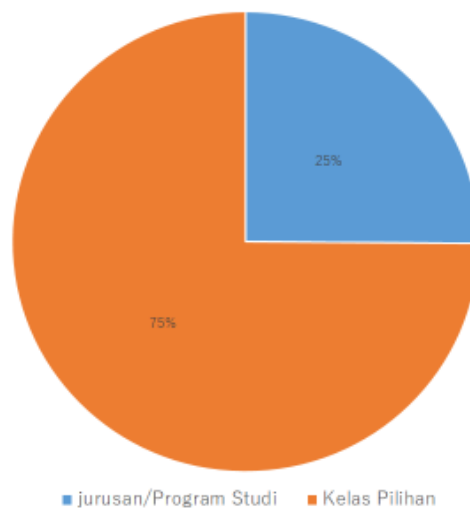


**Diagram 5 Jumlah Dosen, Mahasiswa, Kelas Menurut Sekolah yang Memiliki Bahasa Indonesia Pilihan**  
Sumber: HPISJ, 2017

**g) Presentase Mahasiswa Menurut Jenis Kelas**

Merujuk pada hasil penelitian tahun 2017 tersebut, diketahui bahwa mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia di Jurusan/Program Studi Bahasa Indonesia berjumlah 696, sedangkan mahasiswa yang belajar di kelas pilihan berjumlah 2,075. Kesimpulannya, mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia di Jepang, berjumlah 2,771 dalam setahun.

Dibandingkan dengan mahasiswa yang belajar di kelas pilihan yang notabene hanya menekuni bahasa, mahasiswa yang belajar di Jurusan/Program Studi Bahasa Indonesia memiliki wawasan yang lebih luas, karena selain bahasa, mereka juga mempelajari budaya, sosial, sejarah, seni, sastra, antropologi, politik, serta ekonomi Indonesia. Dari diagram di bawah ini dapat diketahui bahwa seperempat dari seluruh mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia lebih luas wawasannya tentang Indonesia atau menguasai pengetahuan tentang Indonesia.



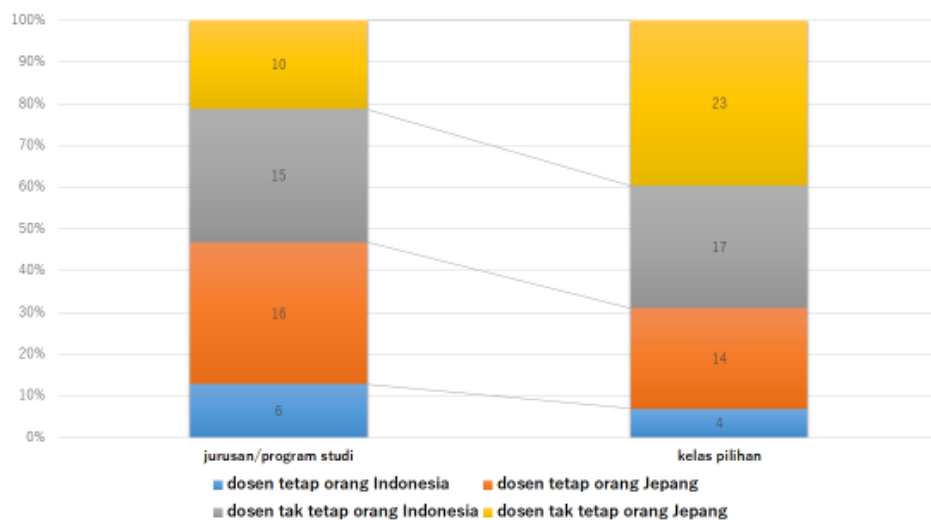
**Diagram 6 Presentase Mahasiswa Menurut Jenis Kelas**

Sumber: HPISJ, 2017

**h) Presentase Jenis Dosen**

Diagram di bawah ini menunjukkan perbandingan rasio dosen di jurusan/program studi bahasa Indonesia dan di kelas pilihan. Di jurusan/program studi perbandingan rasio orang Jepang dan orang Indonesia adalah 26:21, sedangkan di kelas pilihan 37:21.

Kesimpulannya, di jurusan mementingkan mata kuliah berbicara, mendengar, dan menulis selain tatabahasa dan membaca, sedangkan di kelas pilihan, mengutamakan hanya pelajaran tatabahasa dan membaca.



**Diagram 7 Presentase Jenis Dosen**

Sumber: HPISJ, 2017

## PENUTUP

Melalui hasil pengumpulan angket HPISJ dapat diketahui keadaan pendidikan bahasa Indonesia di Jepang pada saat ini.

Sembilan jurusan/program studi bahasa Indonesia di 7 universitas dan 2 akademi memiliki 47 dosen dan 696 mahasiswa. Rasio antara jumlah dosen dan mahasiswa 1:15. Angka ini menunjukkan mutu pendidikan yang sangat tinggi bagi mahasiswa dan ideal untuk mengajar. Mahasiswa tingkat I dan II biasanya wajib belajar bahasa Indonesia 5 kali seminggu dan mahasiswa tingkat III dan IV wajib belajar bahasa Indonesia 1 atau 2 kali seminggu saja, tetapi disediakan kelas bahasa Indonesia lanjut pilihan 5 atau 6 kali seminggu untuk mereka. Mahasiswa dari tingkat 1 sampai IV, selain mempelajari bahasa Indonesia, mereka juga harus mempelajari budaya, seni, sosial, sejarah, ekonomi, politik, dan hal lain tentang Indonesia. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka memperoleh banyak pengetahuan tentang Indonesia. Dengan bekal itu mereka lebih mudah melanjutkan studi ke jenjang S-2 dan lebih mudah mendapat pekerjaan.

Dalam angket kali ini ada 21 sekolah yang mengakomodasi kelas bahasa Indonesia pilihan, dengan 58 dosen dan 2.075 mahasiswa. Perbandingan rasio antara dosen dan mahasiswa 1:36. Tugas para pengajar agak berat karena mereka harus mengajar mahasiswa yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan di jurusan/program studi. Mahasiswa wajib belajar bahasa Indonesia dua kali seminggu, tetapi tidak wajib mengambil mata kuliah tentang Indonesia.

Selain lembaga-lembaga bahasa yang telah disebutkan di atas, cukup banyak perguruan tinggi yang mengajarkan bahasa Indonesia yang tidak mengisi angket. Penulis memperkirakan jumlah mahasiswa yang mempelajari bahasa Indonesia di perguruan tinggi di Jepang lebih kurang 3.500. Jumlah tersebut belum termasuk orang umum, yaitu mereka yang belajar secara privat atau mereka yang memperdalam bahasa Indonesia di sekolah bahasa untuk keperluan pribadi. Dengan demikian, jumlah orang yang belajar bahasa Indonesia di Jepang secara akurat (cermat) tidak dapat dijelaskan.



Tahun 2018 ini hubungan diplomatik Indonesia-Jepang memasuki usia 60 tahun. Enam dekade sudah Jepang dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik. Hubungan ekonomi dan budaya antara Indonesia dan Jepang dirasakan makin erat sehingga banyak orang Jepang datang dan tinggal di Indonesia untuk bekerja atau pun untuk berbisnis. Sebagian dari mereka ada juga yang memperdalam bahasa atau kesenian. Sebelum berangkat ke Indonesia, mereka membekali diri dengan belajar bahasa Indonesia di Jepang agar sesampai di Indonesia dapat langsung berkomunikasi dengan lancar. Untuk itu, orang Jepang akan tetap mempelajari bahasa Indonesia di sekolah atau pun di kantor. Hal itu membuktikan bahwa pendidikan bahasa Indonesia di Jepang sangat penting bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan.

Jika keberadaan Indonesia di peta dunia makin dianggap penting dan dikategorikan sebagai negara maju, bahasa Indonesia pasti makin digemari bahkan tidak mustahil digunakan secara resmi pada forum-forum bergengsi. Dengan demikian, jumlah orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia akan terus meningkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S. T. (1956). *Sedjarah Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Ali, Lukman. (1998). *Ikhtisar Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- (2000). *Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
- Asakura, Sumitaka. (1941). *Jishu Toinmarai-go (Bahasa Indonesia untuk berlatih sendiri)*. Tokyo: Times Shuppansha.
- Azman, Wan Chik. (1982). *Trend-Trend Baru dalam Bidang Pendidikan Bahasa*. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Bahasa, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya.
- Badudu, Yus. (1984). *Ejaan Bahasa Indonesia*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Prima.
- (1986). *Bahasa Indonesia*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Prima.
- Daitoa, Syuppan Kabushiki Kaisya. (1943). *Wilkinson's Malay-English Dictionary*, Tokyo: Daitoa Syuppa Kabushiki Kaisya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1972). *Pedoman Edjaan Bahasa Indonesia jang Disempurnakan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (1986). *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Bahasa dan Pustaka. (1987) *Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Fujino. (1941). *Kamus Standar Bahasa Melayu-Jepun*. Singapore: Hanaya Shokai.
- Funada, Kyoko. dkk. (2018). *Kamus Bahasa Indonesia*, Tokyo: Shogakukan.
- Himpunan Peneliti Indonesia Seluruh Jepang. (2017). *Angket Pendidikan Bahasa Indonesia di Jepang 2017*. Tokyo: Himpunan Peneliti Indonesia Seluruh Jepang.
- Junus, Umar. (1969). *Sejarah dan Perkembangan ke Arah Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia*. Indonesia: Bhratara.



- Kudo, Naoko. (2017). A pioneer of Indonesian language education in Japan - Seido Miyatake as an Indonesian language expert. Dalam *The Journal of Kanda University of International Studies*, No. 29, Chiba: Kanda University of International Studies.
- Kridalaksana, Harimurti. ed. (1982). *Beberapa Karya Pilihan tentang Sejarah Bahasa Indonesia*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- (1991). *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Oesman. (1942). *Pelajaran Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Okikatsu, Aoki. (1820). *Nankai Kibun*. Nagasaki.
- Sato, Eizaburo. (1944). *Kamoes Bahasa Melajoe jang Paling Baroe*. Osaka: Kobunsha.
- Sugono, Dendy. ed. (1988). *Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947—1997*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Taketomi, Seiichi. (1942). *Kamus Besar Bahasa Melayu*. Tokyo: Obunsha.
- Uehara, Kunzo. (1941). *Saishin Malai-go Yotei (Tatabahasa Bahasa Indonesia Terbaru)*. Tokyo: Seibishokaku.
- Winstedt, R.O. (1959). *An Unabridged Malay-English Dictionary*, Singapore/KL: Marican & Sons.
- <https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn>



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 4 Kelompok 7**

Pembicara : Kyoko Funada  
Judul Makalah : “Pendidikan Bahasa Indonesia pada Zaman Dahulu dan Masa  
Kini di Jepang”  
Hari, Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2018  
Pukul : 13.45—15.15  
Moderator : Dony Setiawan, S.S., M.Pd.  
Pencatat : 1. Septimariani  
2. Vita Luthfia Urfa

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Peranan BIPA sangat bermanfaat.
2. Bahasa Melayu diperkenalkan di Jepang pada tahun 1747.
3. Sekolah bahasa asing di Tokyo muncul sejak tahun 1989.
4. Kamus sangat menunjang pembelajaran bahasa.
5. Urutan kemunculan kamus Jepang-Indonesia adalah sebagai berikut: *Kamus Indo-Jepang* (1963), *Kamus Terbaru Bahasa Djepang-Indonesia* (1954), *Kamus Baru Indonesia-Jepang* (1977), *Kamus Baru Jepang-Indonesia* (1984), *Kamus Standar Bahasa Jepang-Indonesia* (1988), *Kamus Standar Bahasa Indonesia-Jepang* (1988).
6. Jumlah universitas/akademi yang mengakomodasi bahasa Indonesia ada 75 universitas.
7. Jumlah universitas yg memiliki program studi bahasa Indonesia sebanyak 7.
8. Hubungan ekonomi dan budaya Indonesia makin erat sehingga banyak orang Jepang ingin mempelajari bahasa Indonesia di Jepang.

**Isu-Isu Penting:**

Sertifikat guru BIPA harus dibuat untuk tenaga pengajar BIPA yg akan mengajar di luar negeri. Sertifikat diberikan secara resmi oleh instansi pemerintah.



**5. BIPA untuk Tujuan Khusus bagi TKA Korea di Bank Woori Saudara:  
Sebuah Respons terhadap Kebijakan Menaker  
BIPA UNTUK TUJUAN KHUSUS BAGI TKA KOREA  
DI BANK WOORI SAUDARA: SEBUAH RESPON TERHADAP  
KEBIJAKAN MENAKER**

**Ade Mulyanah**

Balai Bahasa Jawa Barat

Ad\_ariell@yahoo.com

Ade.Mulyanah@kemdikbud.go.id

**Abstrak**

Tulisan ini ditujukan untuk mendeskripsikan kebutuhan pengembangan bahan ajar BIPA untuk tujuan khusus bagi TKA Korea di Bank Woori Saudara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara dan kajian pustaka. Teknik wawancara digunakan untuk menentukan kebutuhan pemelajar, sedangkan kajian pustaka digunakan untuk mencari rujukan kurikulum. Data dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara dan kuesioner dengan TKA yang merupakan senior eksekutif di Bank Woori Saudara. Fokus penelitian adalah pengembangan bahan ajar BIPA khusus untuk TKA. Pengembangan bahan ajar menjadi penting terkait dengan penghapusan syarat berbahasa Indonesia bagi TKA dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015. Peraturan tersebut merupakan revisi Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013. Dalam program BIPA, bahan ajar yang ideal berhubungan dengan proses belajar mengajar yang dapat diamati mekanisme serta hasilnya (Long, 1991; Richards & Rodgers, 1986; Baradja, 1994). Secara empiris Kartomiharjo (1996) menyatakan bahwa problematika yang sering muncul dalam penyelenggaraan program BIPA banyak bersumber pada persoalan pembelajaran dengan bahan ajar yang tidak tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan bahan ajar BIPA untuk tujuan khusus untuk TKA di Bank Woori Saudara adalah: (1) penghapusan syarat berbahasa Indonesia bagi TKA dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 telah menyulitkan adaptasi TKA dalam memahami peristilahan pada ranah perbankan, unsur kebahasaan, dan materi pemahaman lintas budaya dalam dunia kerja yang disebabkan oleh kemampuan berbahasa mereka yang kurang mumpuni; (2) TKA pada ranah perbankan memerlukan bahan ajar yang khusus terkait dengan tema pada ranah bisnis dengan materi untuk tingkat lanjut (C1 dan C2) walaupun kemampuan bahasa Indonesia para TKA masih tingkat prapemula (A1); dan (3) pemetaan materi yang diperlukan oleh para TKA mencakup peristilahan pada ranah perbankan, unsur kebahasaan, dan materi pemahaman lintas budaya dalam dunia kerja. Materi itu merupakan salah satu wujud fungsi BIPA sebagai pengemban misi strategi dan diplomasi kebahasaan.

**Kata-kata kunci:** BIPA, ranah bisnis, Permenaker, TKA

**Abstract**

*This paper is intended to describe the development needs of materials of BIPA for specific purposes for Korean foreign workers at Bank of Woori Saudara. The method used is a qualitative descriptive. The collecting data techniques used in*



*this research are interview and literature review. The interview technique is used to determine the needs of learners, while the literature review is conducted to find the curriculum reference. The research data is taken from interview and questionnaire with foreign workers who are senior executives at Bank Woori Saudara. The focus of research is the development of teaching materials of BIPA for specific purposes for foreign workers due to the changes in Menaker (Minister of labour and employment) regulations. The development of teaching materials becomes significant in relation to the abolition of the Indonesian language requirement for foreign workers in Permenaker (Minister of labour and employment regulations) number 16 year 2015. The Permenaker is a revision of Permenakertrans number 12 Year 2013. In BIPA program, the ideal teaching materials is related to teaching and learning process that can be observed in the mechanisms and outcomes (Long, 1991; Richard & Rodgers, 1986; Baradja, 1994). In fact, it is empirically stated, that the problems which often arise in the implementation of BIPA program are commonly from the problem of learning and teaching materials that do not go with teaching goals (Kartomihardjo, 1996). The result of the research shows that the development of teaching materials of BIPA for specific purpose for foreign workers in Bank Woori Saudara is as follows: (1) deletion of Indonesian language requirement for foreign worker in Permenaker number 16 of 2015 has made them difficult to understand the terms of banking, language competency, and cross cultural understanding materials in business world due to their lack of ability of their Indonesian profeciency; (2)foreign workers in banking require special teaching materials related to the competency in the business field that the materials are given in advanced level (C1 and C2) despite their Indonesia profeciency still in beginner level (A1); (3) the mapping of materials for business field includes: the terms of banking, language competency, and cross cultural understanding materials in business world. This material is one of the functions of BIPA program as a language strategy and diplomacy mission.*

**Keywords:** BIPA materials, business field, permenaker, TKA

## PENDAHULUAN

Perubahan dominasi kekuatan politik, ekonomi, dan sosial dunia saat ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah berdampak pada berbagai kebijakan pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam masalah investasi telah memengaruhi berbagai sektor sehingga memunculkan kebutuhan pencarian sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Bertalian dengan hal itu adalah kebijakan terbaru pemerintah dalam percaturan ekonomi global, yaitu dengan melonggarkan undang-undang terkait dengan tenaga kerja asing (TKA).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (2017) tercatat peningkatan jumlah TKA yang masuk ke Indonesia. Data tersebut menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia adalah sebagai berikut: pada tahun 2013 berjumlah 70.120 orang, pada tahun 2014 berjumlah 73.624 orang, pada tahun 2015 berjumlah 77.149 orang, pada tahun 2016 berjumlah 80.375 orang, dan pada tahun 2017 berjumlah 85.974 orang. Kenaikan jumlah tenaga kerja asing ke Indonesia tertinggi terjadi pada industri jasa.

Persoalan muncul ketika syarat TKA harus memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang semula disebutkan dalam Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 dihapuskan dalam revisi peraturan





tersebut, yaitu Permenaker Nomor 16 Tahun 2015. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan alasan peningkatan investasi asing di Indonesia. Hal tersebut diasumsikan bahwa longgarnya persyaratan bahasa memungkinkan para investor dapat lebih mudah membawa tenaga kerjanya sendiri. Persyaratan yang dikenakan adalah pihak perusahaan yang mempekerjakan TKA harus memberikan fasilitas berupa tenaga pendamping dan penerjemah sehingga kewajiban alih pengetahuan dan teknologi menjadi lebih mudah. Meskipun demikian, dalam Permenaker tidak disebutkan secara eksplisit. Oleh karena itu, pada praktiknya alih pengetahuan dan teknologi tidak dapat dilakukan dengan cepat karena adanya kendala bahasa dan penambahan rantai kerja, yaitu pihak perusahaan Indonesia harus membiayai jasa penerjemah. Masalah lain adalah ketika bekerja di Indonesia, para TKA mengalami kesulitan untuk memahami budaya kerja Indonesia sehingga menimbulkan hambatan dalam bekerja dan hambatan berinteraksi dengan pekerja lokal. Pada akhirnya, yang bertanggung jawab memberikan fasilitas kesulitan bahasa tersebut adalah pihak pemberi kerja. Namun, penyerahan fasilitas kebahasaan tersebut dilakukan tanpa aturan yang jelas dari pemerintah. Permasalahan bahasa Indonesia bagi TKA ini sebetulnya cukup membuat persoalan tersendiri. Para pemangku kepentingan di bidang BIPA serta mereka yang mencintai bahasa Indonesia tentunya amat berharap bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di setiap tempat kerja, baik bidang swasta, BUMN, maupun perusahaan pemerintah dan PMA.

Banyak tenaga kerja asing bekerja di wilayah Indonesia sama sekali tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Kedatangan mereka juga kerap tanpa menggunakan prosedur keimigrasian yang resmi sebagai seorang TKA, tetapi banyak di antara mereka datang dengan visa turis. Tanpa kemampuan berbahasa Indonesia, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing menciptakan segregasi atau pemisahan antara TKA dan TKI. Dengan segregasi ini tercipta ketidakselarasan antara TKA dan TKI sehingga kondisi itu dapat menimbulkan berbagai isu, seperti kecemburuan sosial antart tenaga kerja dalam satu industri.

Ketidakkemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia bagi TKA yang saat ini dikuasai oleh pekerja dari Tiongkok, terutama pekerja kasar di industri-industri, makin memperburuk kondisi kerja para tenaga kerja. Tenaga kerja tidak memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, timbul pula kecenderungan timbulnya permasalahan tenaga kerja, seperti *keselamatan dan keamanan kerja* yang makin tinggi.

Pengembangan BIPA di dunia internasional amat perlu dilakukan karena bahasa mempunyai peran yang sangat besar dalam *soft diplomacy* (Maryanto, 2017). Dalam hal peningkatan peran bahasa sebagai medium berdiplomasi ini, beberapa program telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Strategi Diplomasi Kebahasaan (PPSDK), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). Dukungan diarahkan pada peningkatan peran bahasa untuk perdamaian dunia sebagai alat strategi dan diplomasi kebahasaan Indonesia.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan persoalan tentang kemampuan kebahasaan para TKA yang masuk ke Indonesia, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.



- a) Apa dampak penghapusan syarat berbahasa Indonesia bagi TKA dalam Permenaker No. 16 tahun 2015 terhadap kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan dunia kerja di Indonesia?
- b) Bagaimana pemeringkatan yang sesuai bagi TKA yang memasuki dunia kerja pada ranah perbankan yang memerlukan bahan ajar khusus yang terkait dengan tema pada ranah bisnis?
- c) Bagaimana pemetaan materi yang diperlukan oleh para TKA yang mencakup peristilahan pada ranah perbankan, unsur kebahasaan, dan materi pemahaman lintas budaya dalam dunia kerja?

## **2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dampak penghapusan syarat berbahasa Indonesia bagi TKA dalam Permenaker No. 16 tahun 2015 terhadap kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan dunia kerja di Indonesia;

- a) mendeskripsikan pemeringkatan yang sesuai bagi TKA yang memasuki dunia kerja pada ranah perbankan yang memerlukan bahan ajar khusus yang terkait dengan tema pada ranah bisnis; dan
- b) memetakan materi yang diperlukan oleh para TKA yang mencakup peristilahan pada ranah perbankan, unsur kebahasaan, dan materi pemahaman lintas budaya dalam dunia kerja.

## **LANDASAN TEORI**

Kajian teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah tentang gambaran kebijakan bahasa yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, peraturan tentang TKA dan kemampuan bahasanya, unsur kebahasaan yang diperlukan oleh TKA, dan kurikulum BIPA.

### **1. Kebijakan Bahasa**

Dasar hukum tentang bahasa telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Hal tersebut dimuat pada Bab III, Bagian Keempat, “Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional”. Pasal 44 UU tersebut berbunyi sebagai berikut.

- a) Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
- b) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh lembaga kebahasaan.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjabaran tentang undang-undang tersebut menunjukkan bahwa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan perintah undang-undang. Untuk itu, pengajaran BIPA di seluruh dunia merupakan bagian dari upaya tersebut.

### **2. Peraturan tentang TKA dan Kemampuan Bahasa**

Untuk menyelaraskan program pemerintah terkait dengan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, ada banyak peraturan bahasa dimasukkan ke dalam ketentuan dalam sektor-sektor tersebut. Dengan membanjirnya para TKA



di Indonesia, bidang perbankan telah merespons hal itu. Dalam Siagian (2017) dijelaskan bahwa peraturan yang mengatur tentang perbankan tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan. Terdapat dua pasal yang secara eksplisit menyebutkan kemampuan berbahasa Indonesia, yaitu Pasal 8 huruf (a) menyebutkan bahwa TKA sebagai Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c) menyatakan TKA sebagai pejabat eksekutif wajib memenuhi persyaratan dapat berkomunikasi yang memadai dalam bahasa Indonesia.

Adanya persyaratan dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia adalah upaya untuk menjaga kewibawaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jika penguasaan bahasa Indonesia para TKA cukup mumpuni, diharapkan mereka dapat berkomunikasi secara baik dengan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, alih pengetahuan dan teknologi akan lebih mudah. Salah satu upaya memartabatkan bahasa Indonesia adalah dengan cara menjadikan sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sesuai dengan tingkat kemampuan TKA yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, dapat juga bukti kemampuan bahasa Indonesia dalam bentuk sertifikat dikeluarkan oleh lembaga pendidikan/instansi pemerintah/kursus bahasa Indonesia yang terdaftar di instansi atau lembaga resmi.

### **3. Unsur Kebahasaan TKA**

Defina & Marasabessy (2017) dan Nevey (2018) menyebutkan bahwa peraturan yang mengatur ihwal wajib berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing telah tertuang dalam Permenaker Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya, yaitu PER.02/MEN/III2008. Penyempurnaan itu dilakukan karena peraturan sebelumnya tidak sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan (Siagian, 2017). Pada Bab V Pasal 26 ayat (1) dalam Permenaker Nomor 12 Tahun 2013 dinyatakan bahwa TKA memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
- b) memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
- c) bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendamping; dan
- d) dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Akan tetapi, dalam Siagian (2017) syarat-syarat tersebut tidak diberlakukan bagi pemangku jabatan, seperti komisaris, direksi, dan pekerjaan yang bersifat sementara.

Aturan itu kemudian direvisi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia yang baru, yaitu Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Yang paling mengejutkan adalah dalam peraturan tersebut, yaitu pada Bab V tentang Persyaratan Tenaga Kerja Asing, dalam Pasal 26 ayat (1) tidak ada lagi syarat kewajiban memiliki



kemampuan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing (TKA). Pasal 26d yang menyebutkan kewajiban berkomunikasi dalam bahasa Indonesia sepertinya dipandang sebagai sebuah aturan yang menghambat peningkatan ekonomi Indonesia yang bersumber dari investasi asing. Hal itu sungguh ironis karena para TKA akan bekerja dan berinteraksi dengan pekerja Indonesia. Bagaimana mungkin mereka dapat bekerja dengan baik jika kemampuan bahasa Indonesia mereka tidak mumpuni.

Apabila dikaji lebih mendalam, perubahan tersebut memperlihatkan bahwa pemasukan pendapatan negara lebih diutamakan. Dalih peningkatan investasi telah banyak mengorbankan upaya pemertabatan bahasa negara, khususnya di ranah bisnis. Bahasa tampaknya tidak lagi dianggap sebagai sebuah alat diplomasi yang sangat penting dalam percaturan bisnis.

#### **4. Pengembangan Bahan Ajar BIPA**

Kegiatan belajar mengajar (KBM) didasarkan pada bahan ajar dan materi ajar yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Kemp (1977: 44) menyatakan bahwa materi ajar adalah materi pelajaran yang berhubungan dengan proses penyusunan desain instruksional. Desain tersebut merupakan gabungan antara pengetahuan, fakta, dan informasi yang terperinci, keterampilan (langkah-langkah, prosedur, keadaan, dan syarat-syarat) dan faktor sikap. Kemp menerangkan perbedaan antara ilmu pengetahuan, keahlian, dan perilaku. Teori pendukung lain adalah dari Merrill. Merrill (2011: 44-45) mengklasifikasikan isi materi pelajaran menjadi empat, yakni fakta, konsep, prosedur, dan prinsip.

Dalam pembelajaran terdapat beberapa aspek yang merupakan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Aspek tersebut memerlukan penanganan yang berbeda. Aspek materi tersebut adalah, antara lain, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif dibagi menjadi empat jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur (Reigeluth, 2009).

#### **5. Kurikulum BIPA dan Penyusunan Bahan Ajar BIPA untuk tujuan khusus**

Mulyanah (2017) menyatakan bahwa ada banyak panduan kurikulum yang diperlukan dalam penyusunan bahan ajar BIPA. Rujukan kurikulum diperlukan sesuai dengan kebutuhan pemelajar. Ada beberapa rujukan kurikulum, antara lain, CEFR, Lote, kompetensi pengajar BIPA Badan Bahasa, dan kurikulum yang dibuat di Australia. Australia memiliki kurikulum yang beragam seiring dengan membanjirnya pemelajar yang tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia.

#### **6. Kurikulum CEFR**

*Common European Framework of References* (CEFR) adalah kurikulum pengajaran bahasa asing yang digunakan di Eropa. Kurikulum itu merupakan kurikulum untuk bahan ajar BIPA Badan Bahasa. Kurikulum CEFR memiliki enam pemeringkatan, yaitu tingkat A1 dan A2 (tingkat dasar), tingkat B1 dan B2 (tingkat madya), dan tingkat C1 dan C2 (tingkat mahir).

Pengajaran bahasa asing dalam CEFR tersebut kemudian diadaptasi dalam pengajaran BIPA Badan Bahasa menjadi kompetensi pengajaran BIPA. Pengajaran dalam CEFR tersebut adalah tingkat A1 dan A2, yang mencakup materi tentang informasi pribadi: nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga,



kepentingannya di tempat umum, misalnya di bank; ATM; kantor imigrasi; rumah sakit; kampus; dan perpustakaan. Pada tingkatan tersebut tata bahasa yang digunakan adalah tata bahasa yang sangat sederhana. Tingkat B1 dan B2 ditujukan agar pemelajar mampu berbicara dengan penutur jati dengan intonasi yang normal. Materi yang diajarkan pada tingkat tersebut, antara lain, ialah pemahaman program radio atau televisi yang berkaitan dengan berita sehari-hari. Tingkat C1 dan C2 adalah tingkat mahir. Pada level ini pemelajar harus mampu memahami bahasa pada ranah akademik untuk presentasi. Pada tingkat ini pemelajar harus mampu berkomunikasi mendekati penutur jati, yaitu merespons gagasan yang disimak dari ceramah dengan lancar dan spontan.

## 7. Kurikulum Australia

Dalam pengajaran BIPA terdapat banyak kurikulum yang digunakan. Pengajaran BIPA di Glenroy College menggunakan kurikulum dari *The Australian Curriculum/Victorian Essential Learning Standard* (AUSVELS), *Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority* (ACARA), dan *Languages Other Than English* (LOTE). Kedua jenis kurikulum tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan bahan ajar yang digunakan oleh pengajar BIPA di Victoria, Australia.

Kurikulum LOTE adalah panduan kurikulum bahasa Indonesia yang merupakan pelajaran bahasa asing di sekolah-sekolah di Australia dan di New York. LOTE berdasarkan sejarahnya berhubungan dengan kebijakan multikulturalisme. Hal itu juga menunjukkan bahwa bahasa asing paling banyak digunakan di daerah lokal sekolah dan berfungsi untuk pemeliharaan identitas budaya masyarakat lokal.

## 8. Pengembangan Bahan Ajar BIPA untuk Tujuan Khusus

Kerangka pengembangan bahan ajar untuk TKA dapat dilihat dari tuntutan dalam dunia kerja. Berkaitan dengan keperluan kebahasaan, kita dapat melihat tuntutan yang harus dimiliki oleh para TKA ketika berkerja di Indonesia. Dalam Permenaker 16/2015 diatur bahwa rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) untuk pekerjaan sementara diberikan untuk

- a) melakukan pembimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
- b) melakukan pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- c) memberikan ceramah;
- d) mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
- e) melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia; dan
- f) melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrik, pelayanan purnajual, atau produk dalam masa penajakan usaha.

Apabila merujuk pada pekerjaan yang ditawarkan di Indonesia, pekerjaan tersebut menuntut para TKA harus memiliki kemampuan berbahasa yang strategis.



## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Taylor dan Bogman, 1984: 5). Teknik yang digunakan ialah kuesioner dan wawancara. Dalam pembuatan bahan ajar digunakan metode kajian pustaka.

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menggali informasi tentang kemampuan berbahasa, diperlukan data tentang pengetahuan tentang budaya kerja di Indonesia dan pengetahuan perbankan dalam bahasa Indonesia. Data tersebut dikumpulkan dengan dua teknik, yaitu tes penempatan (*placement test*), kuesioner, dan wawancara mendalam yang dilakukan kepada para TKA Korea yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kuesioner dan wawancara menggunakan bahasa Inggris karena pada umumnya para TKA tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

### 2. Analisis Data

Kedua data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- Data kemampuan bahasa yang terdiri atas kemampuan mendengar, membaca, menulis, dan tata bahasa dinilai, kemudian diberi pemeringkatan A1—C2.
- Data wawancara dan kuesioner dihitung dan dibuat dalam bentuk persen. Data wawancara terdiri atas pengetahuan tentang budaya kerja dan pengetahuan tentang peristilahan perbankan dalam bahasa Indonesia.

## PEMBAHASAN

Bagian pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dampak penghapusan Permenaker Nomor 16 tahun 2015, kerangka kurikulum bahan ajar BIPA untuk tujuan khusus untuk TKA dalam ranah bisnis, dan pemetaan materi BIPA untuk tujuan khusus dalam ranah bisnis.

### 1. Dampak Penghapusan Permenaker Nomor 16 Tahun 2015

Dari hasil wawancara dan tes penempatan pemelajar BIPA dengan responden berjumlah enam belas orang TKA Korea dihasilkan data sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Tingkat Kompetensi Pemelajar BIPA**

No.	Kompetensi	Penilaian dalam Standar Acuan			
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Kurang
1	Kemampuan berbahasa	6,25 %	12,5%	18,25%	62,50%
2	Pengetahuan tentang budaya dunia kerja di Indonesia	0%	6,25%	12,5%	81,25%
3	Pengetahuan tentang peristilahan perbankan dalam bahasa Indonesia	0%	0%	12,5%	87,50%

Data tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peristilahan dalam dunia perbankan merupakan hal yang paling sulit dihadapi oleh para TKA Korea (87,50%). Pengetahuan tentang budaya kerja di Indonesia juga termasuk sulit dipahami (81,25%). Kemampuan bahasa terlihat bagus walaupun lebih dari sebagian pemelajar masih sulit untuk memahami itu.



## 2. Kerangka Kurikulum Bahan Ajar BIPA untuk tujuan khusus untuk TKA pada Ranah Bisnis

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemelajar, kebutuhan mereka tentang aspek kebahasaan disesuaikan dengan profesi/jabatan mereka ketika bekerja di Indonesia.

Tabel 2

### Pengembangan Bahan Ajar berdasarkan Jabatan Senior Eksekutif

No.	Jabatan	Kebutuhan Materi/Tema
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Presentasi, lingkungan kerja, rapat perusahaan, wawancara kerja, iklan lowongan pekerjaan, istilah dalam rekrutmen, memberi ceramah
2	Teknologi Informasi	Istilah TI, rapat kerja, dll.
3	Manajer Kredit	Istilah perbankan, rapat perusahaan, laporan neraca keuangan
4	Manajer Keuangan/Akunting	Laporan keuangan, penjualan, jenis-jenis utang bank, angka yang jumlah besar, BUMN Indonesia, urusan gaji pegawai
5.	Manajer Personalia	Wawancara kerja, iklan lowongan pekerjaan, memberi ceramah, pelayanan

Dari hasil wawancara dengan pemelajar, data yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut.

- Materi ajar yang perlukan oleh para TKA berupa materi pragmatik (C). Akan tetapi, kemampuan kebahasaan para TKA sangat beragam, yaitu A1, A2, dan B1. TKA dengan kemampuan bahasa yang cukup memadai (A2 dan B1) adalah TKA dengan perpanjangan kontrak kerja. Cakupan materi yang diperlukan dalam lingkungan kerja terkait dengan dunia perbankan, yaitu tema-tema ranah pragmatik (C1—C2). Untuk mempermudah para pemelajar dalam pemahaman materi, pertanyaan dalam latihan soal menggunakan kalimat sederhana.
- TKA Korea memiliki kemampuan yang beragam. Kebutuhan bahan ajar dengan tema-tema perbankan merupakan materi untuk tingkat lanjut (C). Hal itu menyulitkan pembuat bahan ajar untuk memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan para TKA. Akan tetapi, kesulitan yang dihadapi oleh pembuat bahan ajar adalah isi wacana harus autentik sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kehidupan nyata, antara lain, bahasa iklan, bahasa perkantoran, pemahaman angka, istilah perbankan, istilah dalam perusahaan, dan bahasa kuitansi.
- Materi wacana dalam bahan ajar BIPA untuk tujuan khusus mencakup teks fungsional (iklan, lowongan tenaga kerja, pengumuman/memo, grafik, diagram, tabel, surat lamaran kerja, brosur, label, dll.)
- Kompetensi yang diperlukan adalah membaca, menulis, berbicara, mendengar, serta memahami tata bahasa dan ungkapan.

## 3. Pemetaan Materi BIPA untuk Tujuan Khusus dalam Ranah Bisnis dengan Materi Istilah

Cakupan materi dalam bahan ajar berbentuk video yang memuat istilah perbankan adalah sebagai berikut.



**Tabel 3**  
**Istilah dalam Perbankan**

No.	Lema Istilah	Contoh Istilah
1.	Bunga	bunga andalan, bunga bank, bunga biasa, bunga debit, bunga ditambahkan, bunga harian, bunga majemuk, bunga pasti, bunga terantisipasi bunga bank, bunga majemuk, bunga persentase tahunan (BPT), bunga perkenalan
2.	Kartu	kartu afinitas, kartu bank, kartu bisnis, kartu debit, kartu debit plus kartu kredit, kartu kredit bercap gabungan, kartu kredit berjaminan, kartu pembelian, kartu prabayar
3.	Kredit	kredit kepailitan, kewajiban utang kredit, kredit investasi kredit konsumsi kredit macet, kredit dengan agunan kredit pemilikan rumah, kredit tanpa agunan (KTA), kredit retail, laporan kredit layak kredit
4.	Pinjaman	pinjaman atas permintaan, pinjaman perseorangan berangsuran, pinjaman beragunan pinjaman berjaminan, pinjaman perjaminan tabungan, pinjaman dasar tunai, pinjaman multiguna
5.	Pancarupa	agunan, akad kredit, anjungan tunai mandiri (ATM), aset, batas kredit, biaya keuangan, biaya layanan, biro kredit, buku simpanan, cek melambung, debit, debitur, deposito, dokumentasi kredit, fasilitas kredit, jaminan, jaminan bank, jaminan pinjaman, jatuh tempo pembayaran, kaji ulang kredit

Kesulitan para TKA Korea adalah memahami istilah pada ranah perbankan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar harus disusun secara berkesinambungan. Tema untuk wacana BIPA untuk tujuan khusus merupakan ranah pragmatik. Hal tersebut berarti bahwa para TKA harus mempelajari tingkat kemahiran berbahasa yang melebihi kemampuan (C1 dan C2). Persoalan tersebut dipahami bahwa pemelajar dengan kompetensi tingkat dasar (A1 dan A2) harus mempelajari materi pembelajaran dengan kompetensi tingkat lanjut. Sungguh suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Kesulitan tersebut ialah program pelatihan kebahasaan yang ditawarkan di Bank Woori Saudara oleh pihak perusahaan dalam waktu hanya tiga bulan.

#### **4. Materi Kebahasaan**

Pemetaan materi unsur kebahasaan dan materi utuh bahan ajar dapat dilihat dari urutan materi yang merupakan gabungan antara tingkat pemula, lanjut, dan mahir. Penyusunan bahan ajar tersebut dilakukan dengan membuat skala prioritas materi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Penyusunan silabus campuran dapat dilihat dalam tabel berikut.





**Tabel 4**  
**Rancangan Bahan Ajar BIPA untuk Tujuan Khusus**  
**dalam Ranah Bisnis**

No.	Unit	Bahasan
1.	Unit I	Melamar Pekerjaan <ul style="list-style-type: none"><li>● Wacana: iklan lamaran kerja</li><li>● Kosakata dan Ungkapan: kata tanya <i>apa, di mana, berapa lama</i> <i>Di mana Anda bekerja sebelumnya?</i> <i>Berapa lama Anda bekerja di perusahaan tersebut?</i></li><li>● Berbicara: percakapan wawancara kerja</li><li>● Menulis: isian borang/formulir yang berkaitan dengan informasi pribadi: nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dan lain-lain.</li><li>● Tata Bahasa: penyebutan angka</li></ul>
2.	Unit II	Struktur Perusahaan <ul style="list-style-type: none"><li>● Wacana: struktur perusahaan</li><li>● Kosakata: ungkapan profesi dan tempat bekerja</li><li>● Berbicara: percakapan tentang struktur perusahaan</li><li>● Menulis: teks rumpang tentang struktur perusahaan</li><li>● Tata Bahasa: struktur frasa benda (DM) <i>nama saya, pekerjaan saya</i></li></ul>
3.	Unit III	Penerima tamu <ul style="list-style-type: none"><li>● Wacana: iklan lowongan kerja untuk resepsionis/penerima tamu</li><li>● Kosakata: ungkapan-ungkapan bertelepon <i>Halo, bisa bicara dengan ....</i></li><li>● Berbicara: percakapan melalui telepon</li><li>● Menulis: menulis pesan dari telepon</li><li>● Tata Bahasa: kata tanya <i>apa</i> dan <i>siapa</i></li></ul>
4.	Unit IV	Pembelian dan Penjualan <ul style="list-style-type: none"><li>● Wacana: faktur penjualan/pembelian</li><li>● Kosakata: ungkapan berbelanja dan menawar</li><li>● Berbicara: percakapan di telepon atau percakapan bisnis tentang penjualan/pembelian barang tertentu</li><li>● Menulis: permohonan pembayaran</li><li>● Tata Bahasa: adverbial waktu <i>besok, kemarin, lusa, sekarang, dan nanti</i></li></ul>
5.	Unit 5	Perbankan <ul style="list-style-type: none"><li>● Wacana: wacana tentang perbankan (istilah dan jenis pelayanan bank)</li><li>● Kosakata: ungkapan <i>Selamat ..., Semoga ....</i></li><li>● Berbicara: membuka rekening di bank</li><li>● Menulis: urutan mengambil uang lewat ATM</li><li>● Tata bahasa: adverbial: <i>belum, sudah, akan</i></li></ul>



No.	Unit	Bahasan
6.	Unit 6	Korespondensi <ul style="list-style-type: none"><li>● Wacana: pos-el tentang tawaran bisnis</li><li>● Kosakata: hari, tanggal, bulan, tahun</li><li>● Berbicara: percakapan tentang surat masuk dan keluar</li><li>● Menulis: menulis pos-el tentang kerja sama pekerjaan</li><li>● Tata bahasa: posisi dan lokasi <i>di atas, di kanan, dan di bawah</i></li></ul>
7	Unit 7	Alat Tulis Kantor (ATK) <ul style="list-style-type: none"><li>● Wacana: jenis alat tulis kantor (kertas, pensil, pena, penghapus, stapler, dst.)</li><li>● Kosakata: bentuk-bentuk alat tulis kantor (bulat, persegi, segitiga, dst.) dalam bentuk gambar</li><li>● Berbicara: percakapan antarkaryawan tentang alat tulis kantor</li><li>● Menulis: menulis permintaan keperluan alat tulis kantor dalam bentuk formulir permohonan barang</li><li>● Tata bahasa: adjektiva dengan kualitasnya: <i>kecil, kecil sekali, kurus, sangat kecil</i></li></ul>
8.	Unit 8	Perlengkapan kantor <ul style="list-style-type: none"><li>● Wacana: perlengkapan kantor (komputer, mesin faksimile, kalkulator, telepon, meja, kursi, dst.)</li><li>● Kosakata: ungkapan untuk memesan tiket</li><li>● Berbicara: percakapan antara bagian pengadaan barang dan pihak penjual tentang pemesanan perlengkapan kantor</li><li>● Menulis: pemesanan perlengkapan kantor</li><li>● Tata bahasa: penggunaan kata penggolong: <i>seorang, seekor, seperangkat, dan sebuah</i></li></ul>
9.	Unit 9	Memo <ul style="list-style-type: none"><li>● Wacana: memo</li><li>● Kosakata: bahasa dalam pesan singkat yang umum digunakan yg, <i>sgt, dng, dsb., dll.</i></li><li>● Berbicara: percakapan tentang memo</li><li>● Menulis: menulis memo</li><li>● Tata bahasa: kalimat pasif</li></ul>
10.	Unit 10	Tabel, Bagan, dan Grafik <ul style="list-style-type: none"><li>● Wacana: survei tentang pembelian/penjualan dalam bentuk tabel, bagan, dan grafik</li><li>● Kosakata: ungkapan dalam teks pengumuman: <i>Bacalah pengumuman ini ..., Datanglah beramai-ramai ..., Jangan lupa hadir acara ini ....</i></li><li>● Berbicara: percakapan bisnis</li><li>● Menulis: menulis informasi yang berasal dari tabel, bagan, dan grafik</li><li>● Tata bahasa: kata kerja aktivitas harian</li></ul>



No.	Unit	Bahasan
11	Unit 11	Surat Keluhan Pelanggan <ul style="list-style-type: none"><li>● Wacana: surat keluhan pelanggan</li><li>● Kosakata: ungkapan pengharapan: <i>semoga; harap; mudah-mudahan</i></li><li>● Berbicara: percakapan keluhan pelanggan</li><li>● Menulis: menulis surat keluhan tentang sebuah produk</li><li>● Tata bahasa: penggunaan kata negasi: <i>bukan, tidak</i></li></ul>
12	Unit 12	Perjalanan Bisnis <ul style="list-style-type: none"><li>● Wacana: perjalanan bisnis</li><li>● Kosakata berkaitan dengan arah dan lalu lintas: belok kiri, belok kanan, jalan terus, <i>perempatan, pertigaan, putaran, persimpangan</i></li><li>● Berbicara: menunjukkan arah</li><li>● Menulis: pemesanan hotel</li><li>● Tata bahasa: kata depan: <i>di, ke, dari</i></li></ul>

## 5. Materi Pemahaman Lintas Budaya

Dalam dunia kerja, unsur formalitas harus banyak diketahui oleh para senior eksekutif di bank pada saat rapat, juga wawancara kerja, bertemu tamu, presentasi, dan bertanya mengenai keluhan dari pelanggan.

Unsur budaya yang penting diketahui oleh para TKA dalam dunia kerja ialah mereka harus mengerti kesulitan orang Indonesia dalam memahami ungkapan *ya* dan *tidak* yang dilakukan orang Indonesia. Dalam bahan ajar BIPA untuk tujuan khusus harus ada bagian dari bahan ajar yang mengajarkan unsur sosiolinguistik orang Indonesia, terutama dalam budaya kerja. Dalam wawancara terungkap hal yang sulit dipahami, yakni budaya istirahat salat, pegawai yang puasa hari Senin dan Kamis, azan, jam karet, izin urusan keluarga yang terlalu sering, tersenyum sebagai simbol dari ketidaktahuan, dst.

Tema yang berkaitan dengan budaya Indonesia ialah, antara lain, penyapaan untuk orang Indonesia sebagai panggilan akrab, seperti *Bapak, Pak, Ibu, Bu, Kak, Dik, Mas, Mbak*, dan *Bang* dan penyapaan orang yang dihormati tidak dengan sebutan kamu, tetapi dengan panggilan *Pak/Bu*.

Pengenalan kata budaya yang terkait dengan adat istiadat dan agama di Indonesia, seperti azan, hijab, dan hal-hal yang tabu untuk dibicarakan. Di samping itu, juga perlu diberikan pengetahuan tentang ungkapan *filler*, seperti kata *aduh, astaga*, dan *anu*.

Materi pemahaman lintas budaya yang perlu diberikan ialah, antara lain, jabatan tangan dengan lembut, penggunaan jempol untuk menunjuk sesuatu sebagai ungkapan sopan, dan kesulitan budaya mengantre. Ungkapan lain yang tidak lazim dalam budaya Indonesia ialah bertanya dengan "Apa kabar?" yang tidak diutarakan setiap saat. Pengenalan budaya Indonesia lebih banyak dilakukan dengan menampilkan video yang diambil di Youtube. Video yang diambil adalah video yang menampilkan budaya Indonesia, mulai dari makanan, tarian, pakaian, rumah, cara hidup, sampai dengan hal-hal unik yang dimiliki setiap suku di Indonesia.



## PENUTUP

Pengembangan bahan ajar BIPA untuk tujuan khusus bagi TKA di Bank Woori Saudara dapat disimpulkan sebagai berikut.

- (1) Penghapusan syarat berbahasa Indonesia bagi TKA dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 telah menyulitkan adaptasi TKA dalam memahami peristilahan dalam ranah perbankan, unsur kebahasaan, dan materi pemahaman lintas budaya dalam dunia kerja yang disebabkan oleh kemampuan berbahasa mereka yang kurang mumpuni.
- (2) TKA dalam ranah perbankan memerlukan bahan ajar yang khusus terkait dengan tema pada ranah bisnis dengan materi untuk tingkat lanjut (C1 dan C2) walaupun kemampuan bahasa Indonesia para TKA masih tingkat prapemula (A1).
- (3) Pemetaan materi yang diperlukan oleh para TKA mencakup peristilahan dalam ranah perbankan, unsur kebahasaan, dan materi pemahaman lintas budaya dalam dunia kerja. Materi ini merupakan salah satu wujud fungsi BIPA sebagai pengemban misi strategi dan diplomasi kebahasaan.

Walaupun ada strategi untuk menyasati kesulitan pemelajar karena kemampuan bahasa yang minim, penghapusan syarat *dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia* bagi tenaga kerja asing yang terdapat dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 yang merupakan revisi Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 mungkin sebaiknya dikaji ulang. Pengiriman TKA tanpa kemampuan bahasa bukan hanya menyulitkan mereka, melainkan juga menyulitkan perusahaan. Pengiriman TKA yang tidak memiliki kemampuan bahasa mungkin akan berdampak pada nilai investasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah.

Pembekalan bahasa untuk TKA di negara asal akan sangat efektif karena para TKA tersebut akan mampu bekerja saat tiba di Indonesia. Fasilitas kebahasaan yang diberikan oleh Bank Woori Saudara hanya memberikan pengetahuan dasar tentang kebahasaan sehingga pembekalan bahasa semestinya diberikan dalam bentuk karantina oleh Dinas Tenaga Kerja dengan melibatkan lembaga yang menaungi BIPA, yaitu Badan Bahasa. Persyaratan tentang kemampuan bahasa pada TKA merupakan upaya dalam memartabatkan bahasa Indonesia sebagai alat untuk diplomasi internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baradja, M.F. (1994). "Why The Communicative Language Teaching?". Makalah *Seminar on Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Indonesia*. FPBS IKIP Malang: UNM Publishing.
- Corder, S. (1978). "Language-Learner Language". dalam Richard, J. *Understanding Second and Foreign Language Learning*. Rowley: Newbury House Publisher, Inc.
- Defina dan Marasabessy. (2017). "BIPA antara MEA dan Kebijakan Menaker". Dalam *Prosiding Internasional Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIP BIPA) X*. Halaman 77—84. Malang: Media Nusa Creative.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2013). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.



- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2015). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
- Kemp, Jerold. (1977). *Instructional Design: A Plan for Unit and Curriculum Development*. New Jersey: Sage Publication.
- Kartomihardjo, Soeseno. (1996). "Penyelenggaraan BIPA: Beberapa Hambatan dan Usaha Penanggulangannya". Dalam *Kumpulan Makalah Kongres Internasional BIPA*. Jakarta: Listakwarta Putra.
- Long, Michael, *et al.* (1991). *An Introduction to Second Language Research*. London: Longman.
- Maryanto. (2017). "Pengembangan BIPA dan Bahasa Asing Strategis: Kerangka Strategi dan Diplomasi Kebahasaan". Dalam *Prosiding Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIP BIPA X)*. Hal 40—52. Malang: Media Nusa Creative.
- Merril, David. (2011). "First Principle of Instruction". Hal 44-45. Dalam <http://davidmerril.com.papers.firstprinciplevymerrilpdf>.
- Mulyanah, Ade. (2017). "Materi Pengajaran Bipa di Glenroy College, Melbourne: Pengenalan Bahasa dan Budaya". Dalam *Prosiding Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIP BIPA X)*. Hlm. 232—242. Malang: Media Nusa Creative.
- Nevey, Ariani. (2018). "Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 18. <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/38>.
- Ramdani. (2016). "Mengapa Pekerja Asing Tak Wajib Berbahasa Indonesia". <https://www.dream.co.id/dinar/pekerja-asing-tak-wajib-berbahasa-indonesia-ini-alasannya-160301o.html>. Diunduh pada Tanggal 4 Februari 2018.
- Richards, Jack C. dan Rodgers, Theodore S. (1986). *Approach and Methods in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reigeluth, M. Charles & Alison A. (1987). *Instructional-Design Theories and Models Volume III*. Hlm. 6.: "Building a Common Knowledge Base". New York: Routledge.
- Syahrin, Muhamad. (2018). "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian". Dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 18. <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/331>
- Suhandi. (2016). "Pengaturan Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Asing dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia". *Perspektif*, 21(2):135--148. <http://jurnalerspektif.org/index.php/perspektif/issue/view/65> (Diunduh 1 Mei 2018).
- Siagian. (2017). "Menyigi Peraturan tentang Kebahasaan dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing". Dalam *Prosiding Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIP BIPA X)*. Hal 85—94. Malang: Media Nusa Creative.
- Taylor & Bogman. (1984). *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings*. New York: Wiley- Interscience.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

"Poin Apa Sajakah yang wajib Diketahui Seputar Aturan Ketenagakerjaan Asing?"  
<http://easybiz.id/poin-poin-penting-terbaru-yang-wajib-diketahui-seputar-aturan-ketenagakerjaan-asing/diunduh>.

“Tenaga kerja asing dan bahasa Indonesia”. Diterbitkan pada 26 Maret 2015 .  
Diunduh dari

[http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/ukbi/v2/index.php/berita/106-tenaga-kerja-asing-dan-bahasa-indonesia.\\_23](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/ukbi/v2/index.php/berita/106-tenaga-kerja-asing-dan-bahasa-indonesia._23) Agustus 2017.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Ade Mulyanah  
Judul Makalah : “BIPA untuk tujuan khusus untuk TKA Korea di Bank Woori Saudara: Sebuah Respons terhadap Kebijakan Menaker”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 08.00—09.30  
Moderator : Dra. Ovi Soviaty Rivay, M.Pd.  
Pencatat : Retno Handayani

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Kebijakan pemerintah dalam menghapus syarat berbahasa Indonesia bagi TKA dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 menimbulkan dampak negatif terhadap kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan dunia kerja di Indonesia.
2. Banyak tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di wilayah Indonesia yang tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
3. Ketidakmampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia bagi TKA, yang saat ini didominasi oleh pekerja dari Tiongkok, terutama pekerja kasar di industri-industri, makin memperburuk kondisi kerja para tenaga kerja.
4. Ketidapkahaman berbahasa Indonesia menyulitkan adaptasi TKA dalam memahami peristilahan pada ranah perbankan, unsur kebahasaan, dan materi pemahaman lintas budaya dalam dunia kerja sehingga tenaga kerja asing tidak memahami hak dan kewajiban mereka.
5. Persyaratan bagi TKA untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia adalah upaya untuk menjaga kewibawaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jika penguasaan bahasa Indonesia para TKA cukup mumpuni, diharapkan mereka dapat berkomunikasi secara baik dengan tenaga kerja lokal.
6. Diperlukan pengembangan bahan ajar BIPA untuk tujuan khusus bagi TKA yang bekerja di Indonesia.
7. Penghapusan syarat *dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia* bagi tenaga kerja asing yang terdapat pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 yang merupakan revisi Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 mungkin sebaiknya dikaji ulang.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Defina  
Instansi : IPB

**Pertanyaan:**

Saya melihat pemerintah, baik dari DPD maupun DPRD, sebenarnya sudah memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia dan kemampuan berbahasa Indonesia bagi penutur asing. Bahkan, Dede Yusuf pernah mengatakan, “Jangan berpikir tentang kemahiran menggunakan bahasa-bahasa PBB. Kita berpikir saja



tentang bahasa ASEAN. Bahasa ASEAN adalah bahasa yang hidup dalam masyarakat. Bahasa Inggris adalah bahasa kolonial.” Bagaimana kita dapat memperjuangkan bahasa Indonesia agar kemahiran berbahasa Indonesia diwajibkan lagi bagi penutur asing?

**Jawaban:**

Itu pertanyaan yang berat bagi saya. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tidak mengatur tentang pengiriman TKA ke Indonesia sehingga target kebahasaan tidak tersampaikan. Untuk itu, harus ada kerja sama lintas kementerian. Setiap kementerian memiliki kebijakan masing-masing dan yang membuat peraturan tentang TKA bukan Kemendikbud, melainkan Kemenakertrans. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas kementerian. Kemenaker mungkin tidak tahu bahwa kewajiban untuk dapat berbahasa Indonesia bagi TKA itu penting.

**Penanya 2**

Nama : Vera Ginting  
Instansi : Badan Bahasa

**Tanggapan:**

Menurut saya, pengajaran BIPA untuk TKA itu penting. Saya memiliki satu pengalaman, yaitu dipijat oleh TKA Korea. Pada saat itu, saya kesakitan dan mengeluh, tetapi tidak direspons oleh TKA itu karena dia tidak memahami bahasa Indonesia. Pemerintah mementingkan devisa, tetapi tidak mengiringinya dengan perhatian terhadap bahasa. Kita bisa menjadi kaya, tetapi identitas kita melemah. Seluruh kementerian harus bekerja sama untuk menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas budaya kita. Persoalan lirik lagu yang dicekal oleh KPI, menurut saya, memang baik untuk dilakukan. Hal itu dilakukan untuk menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mengungkapkan kesantunan yang tidak dapat dikikis hal yang dapat mencemari pikiran.

**Jawaban:**

Saya sepakat dengan Ibu Vera. Kita tidak hanya berbicara tentang kebanggaan, tetapi juga tentang bagaimana agar para TKA dapat bekerja dengan baik di Indonesia. Mereka dibayar mahal sehingga juga harus dapat berkerja dengan baik. Untuk dapat bekerja dengan baik, mereka harus memulainya dengan kemampuan berkomunikasi yang baik. Selain itu, dalam berkomunikasi diperlukan juga pemahaman budaya, tidak hanya pemahaman bahasa.

**Penanya 3**

Nama : Marlina  
Instansi : UNJ

**Pertanyaan:**

1. Kebijakan Menteri Tenaga Kerja dalam penghapusan syarat berbahasa Indonesia memang perlu dikaji ulang, tetapi hasil penelitian Ibu hanya melihat dari sisi siswa. Saya melihat bahwa penghapusan syarat tersebut tidak hanya berefek bagi siswa, tetapi juga berefek merugikan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. TKA itu dapat memperoleh pekerjaan yang dapat dilakukan oleh





orang Indonesia. Apakah bahan ajar BIPA untuk tujuan khusus sudah mengacu pada UKBI sebagai standar atau belum?

2. UKBI yang digunakan Bu Ade adalah UKBIPA untuk kelompok, sedangkan yang digunakan oleh semua pengajar BIPA adalah UKBI standar. Menurut Ibu, UKBIPA yang digunakan seharusnya yang mana? Jika UKBIPA yang Ibu terapkan adalah sesuatu yang baik, mengapa tidak direkomendasikan?

**Jawaban:**

1. Kami menggunakan UKBIPA versi Balai Bahasa Jawa Barat. UKBIPA tersebut memang belum disahkan, tetapi drafnya sudah mulai diterapkan. UKBIPA itu juga belum menjadi bentukan UKBIPA dari Badan Bahasa.
2. UKBIPA hanya digunakan dalam proses KBM/pengajaran di kelas. UKBIPA digunakan untuk penempatan TKA, di kelas atau tingkat apa. Untuk UKBI bersertifikat, kami tetap menggunakan UKBI standar nasional.

**Penanya 4**

Nama : Maliudin

Instansi : Universitas Haluoleo Kendari

**Tanggapan:**

1. Ketika kami berdiskusi dengan pengelola sebuah rumah sakit di Morowali, pihak rumah sakit itu menyatakan bahwa mereka pernah menerima pasien TKA dari Cina yang mengalami kecelakaan kerja di Morowali. Mereka mengalami kesulitan untuk berkomunikasi. Para TKA itu tidak bisa menulis dalam huruf Latin. Mereka hanya bisa berbahasa Cina. Oleh karena itu, dipanggillah orang Cina yang sudah lama menetap di kendari yang bisa berbahasa Indonesia dan Cina.
2. Kami rugi jika berada dalam satu antrean dengan TKA di kantor imigrasi. Pertemuan dan komunikasi langsung menjadi sulit karena pihak imigrasi cenderung mengutamakan mereka yang tidak paham bahasa Indonesia.

**Jawaban:**

BIPA untuk TKA berkaitan juga dengan keselamatan kerja. Hal itu tidak hanya berkaitan dengan kewibawaan kita, bangsa Indonesia, tetapi juga dengan para TKA yang akan kesulitan untuk bertahan di Indonesia. Jika tidak bisa berkomunikasi, bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik?

**Isu-Isu Penting:**

1. Kebijakan Menakertrans tentang penghapusan syarat kemahiran berbahasa Indonesia untuk TKA harus dikaji ulang karena menyangkut keselamatan kerja, hasil pekerjaan TKA, dan budaya kerja. Pengaruh penghapusan syarat tersebut juga berakibat pada kesempatan warga negara Indonesia yang berkurang dalam memperoleh pekerjaan di negeri sendiri.
2. Diperlukan kerja sama lintas kementerian (Kemendikbud dengan Kemenakertrans) untuk memberlakukan kewajiban penguasaan bahasa Indonesia bagi TKA yang akan bekerja di wilayah Indonesia. Seluruh kementerian harus bekerja sama untuk menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas budaya kita.



3. Kita bisa kaya karena pemerintah memperhitungkan devisa dengan menerima TKA secara bebas, tetapi identitas kita melemah karena hal itu tidak diiringi dengan syarat berbahasa Indonesia.



**6. Pengenalan Bahasa Indonesia di Kamboja melalui Pengajaran BIPA: Perwujudan Wacana Bahasa Indonesia sebagai Bahasa ASEAN**  
**PENGENALAN BAHASA INDONESIA DI KAMBOJA MELALUI**  
**PENGAJARAN BIPA: PERWUJUDAN WACANA BAHASA**  
**INDONESIA SEBAGAI BAHASA ASEAN**

**Exti Budihastuti**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
extibudihastuti@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengenalan bahasa Indonesia di Takeo, Kamboja, melalui pengajaran BIPA. Takeo, salah satu provinsi di Kamboja, terletak 85 km dari ibu kota negara, Phnom Penh, yang sebagian besar masyarakatnya tidak mengenal Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang menggunakan pengamatan, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengenalan bahasa Indonesia di Takeo, Kamboja, melalui pengajaran BIPA menghadapi beberapa kendala, di antaranya adalah faktor budaya yang berbeda, faktor geografis yang menyulitkan komunikasi masyarakat Takeo dengan dunia luar, dan faktor hubungan diplomasi dua negara. Penelitian ini merekomendasikan segera terbentuknya kamus bahasa Indonesia-Khmer dan Khmer-Indonesia sebagai pendukung upaya perwujudan wacana bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN.

**Kata-kata kunci:** pengenalan bahasa, pengajaran BIPA, bahasa ASEAN

**Abstract**

*This study aims to find out the effort of introducing Indonesian language in Takeo, Cambodia through BIPA teaching. Takeo, one of Cambodia's provinces, is located 85 km from the state capital, Phnom Penh, where most of the people do not know Indonesia. The method used in this research is qualitative approach with descriptive analysis using observation, interview, and literature study. The result of the research shows that the effort of introducing Indonesian language in Takeo, Cambodia through BIPA teaching faces several obstacles, among them are different cultural factors, geographical factors that complicate Takeo community communication with the outside world, and the two-state diplomatic relations factor. This research recommends the establishment of Indonesian-Khmer and Khmer-Indonesia dictionaries as supporting the realization of Indonesian language discourse as an ASEAN language.*

**Keywords:** language recognition, BIPA teaching, ASEAN language

**PENDAHULUAN**

Kegiatan pengamatan dalam rangka penelitian ini diawali dengan penawaran seleksi pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing ke luar negeri oleh Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK). Penulis memulai tantangan baru untuk melangkah sedikit lebih maju agar dapat mengajar di luar negeri. Tantangan itu lebih dipertegas lagi dengan datangnya surat undangan dari Regional Polytechnic Institute Techno Sen (RPITS) Takeo, Kamboja, untuk



mengajar bahasa Indonesia di sekolah itu selama empat bulan. Undangan tersebut adalah jawaban dari permohonan pengiriman tenaga pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) yang merupakan program kerja sama antara PPSDK, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) dan SEAMOLEC (South East Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Center), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada acara pembekalan tenaga pengajar BIPA ke luar negeri yang diselenggarakan oleh PPSDK di Jakarta, pada Selasa, 16 Februari 2016, Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada saat itu, membekali sekaligus melepas delapan puluh pengajar BIPA ke luar negeri. Para pengajar ini nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi pengajar biasa. "Jangan cuma jadi pengajar BIPA, tetapi duta Indonesia," kata Anies di Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), (<http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/16/02/17/o2om87>). Kata-kata yang tersurat dalam sambutan Anies Baswedan itu memang sangat bermanfaat bagi calon pengajar BIPA. Apalagi untuk calon pengajar BIPA yang belum pernah sekali pun ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara.

Menurut Anies, ketika ada pilihan sebagai pengajar BIPA, orang tersebut dapat disebut sebagai duta bangsa karena dititipi bangsa, bahasa, dan budaya Indonesia. Hal itu disebabkan segala sesuatu yang dilakukan dan diucapkan nanti akan merefleksikan Indonesia. Karena itu, kepergian pengajar BIPA ke luar negeri menjadi momen penting untuk memperkenalkan Indonesia. Lebih lanjut Anies menyatakan bahwa kegiatan ini juga menjadi kesempatan eksplorasi dan ini harus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memperluas hubungan diplomatik dengan negara lain. Meskipun hanya mengajar selama empat bulan, para pengajar harus memberikan kesan yang baik bagi para siswa di sana. Dalam hal ini para pengajar harus siap mendengar berbagai pertanyaan kritis dari para siswa di luar negeri tentang bangsa, bahasa, dan budaya Indonesia (<http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/16/02/17/o2om87>).

Berkaitan dengan tugas mengajar BIPA yang diemban oleh penulis, tujuan negara apa pun tidak menjadi masalah. Ketika mendapat kabar bahwa Kamboja adalah negara tujuan penulis, penulis bertekad untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke negara itu. Kamboja adalah salah satu negara anggota ASEAN. Zulfikar (2013) mengatakan bahwa Indonesia pada dasarnya memiliki kekuatan untuk melakukan diplomasi kebahasaan dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai embrio bahasa yang digunakan di wilayah negara-negara ASEAN. Permasalahan justru muncul ketika penulis mengetahui bahwa tempat pengajaran BIPA bukan di ibu kota negara, melainkan di sebuah wilayah yang terletak sekitar delapan puluh kilometer dari Pnom Penh, ibu kota Kamboja. Itulah sebenarnya masalah yang dihadapi penulis, bagaimanakah upaya pengenalan bahasa Indonesia di Takeo, Kamboja melalui pengajaran BIPA?

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengenalan bahasa Indonesia di Takeo, Kamboja melalui pengajaran BIPA dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya penyebaran bahasa Indonesia di Takeo, Kamboja.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang menggunakan cara pengumpulan data melalui pengamatan,



wawancara, dan studi pustaka. Pengamatan dilakukan terhadap 175 orang siswa RPITS Takeo dan wawancara dilakukan terhadap 20 orang di RPITS Takeo yang terdiri atas guru, kepala sekolah, direktur, staf pendidikan, staf keuangan, pemilik kantin sekolah, dan pengelola pemondokan. Waktu pelaksanaannya adalah ketika peneliti melaksanakan tugas sebagai pengajar BIPA pada tanggal 1 Maret s.d. 30 Juni 2017.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengenalan Bahasa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V versi daring, pengenalan adalah ‘proses, cara, perbuatan mengenal atau mengenali’. Proses mengenal bahasa yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah proses mengenal bahasa Indonesia sebagai bahasa asing bagi siswa RPITS Takeo. Dalam KBBI Edisi V versi daring itu disebutkan bahwa bahasa asing adalah ‘bahasa milik bangsa lain yang dikuasai, biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri’. Hal itu berarti ada pendidikan khusus untuk mempelajari bahasa asing.

Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan pada perilaku siswa, guru, kepala sekolah, direktur, staf pendidikan, staf keuangan, pemilik kantin sekolah, atau pengelola pemondokan, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Takeo yang berpendidikan tinggi atau dianggap sering berhubungan dengan dunia di luar sekolah (kampus) menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang mereka kenali. Oleh karena itu, ketika ada bahasa asing lain yang diperkenalkan, mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Untuk pengenalan bahasa Indonesia, sebagian di antara mereka mengklaim sudah mengenal bahasa Indonesia yang mereka sebut sebagai bahasa Malaysia (bahasa Melayu) karena di antara mereka sudah pernah belajar di Malaysia.

Pengenalan bahasa yang dilaksanakan di RPITS Takeo, Kamboja, ini memang tidak semudah di tempat lain yang memang mempunyai motivasi kuat untuk mempelajarinya. Motivasi itu, misalnya, keinginan menguasai ilmu dan teknologi negara asing yang dipelajari bahasanya atau ingin bekerja di sana. Motivasi pengenalan bahasa yang dilaksanakan di RPITS Takeo, Kamboja, itu justru datang dari pemerintah Indonesia yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai embrio bahasa yang digunakan di wilayah negara-negara ASEAN.

### **2. Pengajaran BIPA**

Menurut Budihastuti (2017a), Takeo adalah sebuah provinsi di Kamboja. Letaknya kurang lebih delapan puluh lima kilometer dari Phnom Penh, sebagai ibu kota Kamboja. RPITS adalah salah satu institut negeri yang ada di Takeo. Institut ini berada di bawah naungan Departemen Tenaga Kerja di Kamboja yang sejak tahun 2014 menampung lulusan siswa setingkat sekolah menengah atas. Para siswa tidak dipungut biaya pendidikan dan sebagian besar di antaranya tinggal di asrama kampus. Lama pendidikan sekitar tiga sampai empat tahun. Jurusan yang ada di antaranya adalah Bahasa Inggris, Otomotif, Peternakan, Akuntansi, Listrik, Teknik Komputer, Logistik, dan Konstruksi.

Pengajaran bahasa Indonesia di RPITS Takeo dikategorikan sebagai mata kuliah ekstrakurikuler. Namun, jadwal kehadiran penulis di kelas mengikuti jadwal perkuliahan yang sudah ada. Jadi, pada hari Senin—Jumat peneliti



mengajar sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh pihak sekolah. Jadwal tersebut tergambar dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Jadwal RPITS Takeo (Maret—Juni 2017)**  
**Tempat: Meeting Hall (Building B) RPITS Takeo**

<i>Waktu/ Hari</i>	<i>Senin</i>	<i>Selasa</i>	<i>Rabu</i>	<i>Kamis</i>	<i>Jumat</i>
8.00- 9.30					
15'	*****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****
9.45- 11.15			<i>Group 2:</i> 1. <i>Veterinary</i> (AD dan BA) (Y1, S1) 2. <i>ICT</i> (AD dan BA) (Y1, S1)	<i>Group 4:</i> 1. <i>Veterinary</i> (AD dan BA) (Y2, S1) 2. <i>ICT</i> (HD dan BA) (Y2, S1)	<i>Group 6:</i> 1. <i>Logistic</i> (AD) (Y2, S1) 2. <i>Accounting</i> (AD dan BEd) (Y2, S1)
15'	*****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****
15.45- 17.15	<i>Group 1:</i> 1. <i>English Literature</i> (AD dan BEd) (Y1, S1) 2. <i>Accounting</i> (AD dan BEd) (Y1, S1)	<i>Group 7:</i> 1. <i>Automotive</i> (HD) (Y2, S1) 2. <i>Construction</i> (HD) (Y2, S1) 3. <i>Construction</i> (HD) (Y1, S1)	<i>Group 3:</i> 1. <i>Automotive</i> (HD) (Y1, S1) 2. <i>Electricity</i> (HD dan BA) (Y1, S1)	<i>Group 5:</i> 1. <i>Automotive</i> (HD) (Y2, S1) 2. <i>Electricity</i> (HD dan BA) (Y2, S1)	

Sumber: Laporan Pengajaran BIPA di Kamboja Tahun 2016

Selanjutnya, Budihastuti (2017b) mengatakan bahwa pengajaran BIPA di RPITS Takeo itu diawali dengan mengenalkan Indonesia melalui tayangan video lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan melalui bola dunia kecil. Tayangan video lagu kebangsaan “Indonesia Raya” digunakan untuk memperlihatkan sedikit informasi tentang Indonesia melalui lagu kebangsaan. Berdasarkan pengamatan, isi syair lagu itu memang tidak dipahami oleh siswa dan guru yang mendengar. Namun, melalui kemampuan bahasa Inggris penulis yang minimalis, teks lagu



diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Khmer (bahasa para siswa). Hal itu dianggap menjadi satu-satunya cara agar penulis dapat menyampaikan maksud isi syair lagu “Indonesia Raya.” Sementara itu, disadari pula bahwa tidak semua siswa mengetahui keberadaan negara Indonesia. Dengan menggunakan bola dunia kecil itulah ditunjukkan letak negara Indonesia.

Setelah dikenalkan negara Indonesia, mulailah dikenalkan bahasa Indonesia. Pengajaran bahasa Indonesia dimulai dari pengenalan diri, lalu pengenalan alfabet bahasa Indonesia, dan pengucapan salam. Pengajaran awal itu selama lebih kurang satu bulan, masih dibantu guru bahasa Inggris yang menerjemahkan kata-kata dalam Inggris ke dalam bahasa Khmer.

Sebagai mata kuliah ekstrakurikuler bahasa asing yang dipelajari setelah bahasa Inggris, pengajaran bahasa Indonesia mengalami beberapa kendala. Di antaranya adalah motivasi belajar bahasa Indonesia yang harus ditumbuhkan langsung oleh sang pengajar, pihak sekolah hanya memfasilitasi saja. Selain itu, kamus dwibahasa Indonesia-Khmer dan Khmer-Indonesia belum selesai disusun. Jadi, pengajar harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

**Tabel 2**  
**Materi Pengajaran BIPA**

No.	Pertemuan ke-	Materi
1	1	Memperkenalkan diri, yaitu perkenalan nama guru.
2	2	Mengenal alfabet (A—Z), berikut cara melafalkan dalam bahasa Indonesia dan perbedaannya dengan lafal bahasa Inggris.
3	3	Mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan mengucapkan selamat tinggal.
4	4	Mengenalkan nama benda di sekitar kita.
5	5	Mengenalkan nama hari dan bulan.

Sumber: Laporan Pengajaran BIPA di Kamboja Tahun 2016

Lebih lanjut Budihastuti (2017d) mengatakan bahwa kendala lain dalam pengajaran adalah persoalan huruf yang biasa digunakan oleh para siswa. Sebagian besar siswa belum terbiasa membaca huruf Latin. Jadi, penulis harus sering mengulang materi pelajaran dengan harapan para siswa sering mendengar kosakata baru bahasa Indonesia.

Pengulangan materi sering dilakukan oleh peneliti, bukan saja di dalam kelas, melainkan juga di luar kelas. Ketika bertemu dengan siswa, guru, atau staf tata usaha, penulis menggunakan kosakata bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ketika bertemu dengan siswa, guru, atau staf tata usaha yang tidak bisa berbahasa Inggris, penulis akan meminta orang di dekatnya yang bisa berbahasa Inggris untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Khmer. Selain itu, penulis juga menggunakan gambar dan alat peraga lain yang dapat menyebutkan kosakata bahasa Indonesia, terutama kata benda.

Selain karena kendala penggunaan huruf, penulis juga karena menghadapi kendala waktu belajar. Banyak sekali waktu belajar yang dipakai untuk kegiatan



di luar kegiatan belajar-mengajar, seperti kegiatan persiapan acara perkemahan di kampus, kegiatan perkemahan, kegiatan libur keagamaan, libur tahun baru, libur ulang tahun raja, dan hari libur lainnya. Dengan waktu belajar yang meloncat-loncat, kegiatan belajar-mengajar otomatis menjadi terganggu.

Dengan kondisi yang demikian, pengamatan penulis untuk mendapatkan data penelitian ini tidak berhenti begitu saja. Ketika ada kegiatan persiapan acara perkemahan di kampus, kegiatan perkemahan, kegiatan libur keagamaan, libur tahun baru, libur ulang tahun raja, dan hari libur lainnya, penulis ikut berbaur mengikuti kegiatan tersebut dengan harapan tetap dapat mengenalkan kosakata baru kepada mereka.

### **3. Faktor Budaya**

Menurut Budihastuti (2017a), dilihat dari faktor budaya telah terjadi kompetensi interkultural ketika penulis mengajarkan bahasa Indonesia di Kampus Takeo walaupun kebutuhan sintas, seperti mencari makanan, minuman, dan menjalankan ibadah, masih terbatas. Untuk makanan, secara terbuka mereka sudah memberi tahu bahwa yang mereka makan mengandung babi, makanan yang tidak boleh penulis makan. Kompetensi interkultural juga terjadi ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun masih menggunakan bahasa perantara bahasa Inggris, penulis sudah bisa mengajarkan pengucapan salam, perkenalan diri, dan penyebutan hari, bulan, dan tahun, serta angka satu sampai dengan sepuluh dalam bahasa Indonesia. Selain itu, kompetensi interkultural terjadi ketika penulis memperoleh kesempatan mempelajari bahasa Khmer. Dengan membandingkan kesulitan ketika penulis mempelajari bahasa Khmer, diharapkan warga Takeo juga mau bersusah payah mempelajari bahasa Indonesia.

Di samping kendala yang sudah disebutkan, ada kendala lain dalam mengenalkan bahasa Indonesia. Walaupun masih dalam satu wilayah negara-negara ASEAN, faktor budaya yang amat mencolok adalah mayoritas penduduk Takeo yang beragama Buddha. Di Indonesia masyarakat beragama Buddha adalah kaum minoritas. Sebaliknya, di Kamboja masyarakat beragama Islam menjadi kaum minoritas. Para siswa di sana harus mengikuti berbagai acara keagamaan.

Di Takeo banyak dijumpai pria berpakaian pendeta Buddha. Kehidupan mereka hampir sama dengan kebanyakan masyarakat pada umumnya. Beberapa dari mereka ada yang bersekolah di RPITS Takeo atau sekolah umum lainnya. Di RPITS Takeo ada sekitar 10% dari jumlah murid yang menggunakan pakaian pendeta. Menurut keterangan yang diperoleh dari kepala sekolah dan guru-guru, pilihan menjadi pendeta merupakan kebanggaan keluarga. Anak yang menjadi pendeta dipercaya dapat membawa keberkahan bagi keluarganya.

Di sekolah tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada siswa berpakaian pendeta. Berdasarkan pengamatan penulis, keistimewaan diberikan kepada para siswa berpakaian pendeta itu tatkala hendak makan bersama. Pada suatu hari, ketika kami, warga RPITS Takeo piknik bersama ke daerah Angkor Borey, penulis melihat para siswa berpakaian pendeta itu menikmati makan siang dalam perlakuan yang berbeda. Mereka makan dengan meja dan kursi yang disediakan khusus. Walaupun menu makanan sama, waktu pelaksanaan makan siang itu berbeda, sekitar satu jam sebelum siswa lain makan siang.





**Diagram 7 Presentase Jenis Dosen**

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Menurut Budihastuti (2017c), dari segi kuliner, banyak makanan yang dijual di Takeo tidak bisa dimakan kaum muslim. Sebenarnya jenis sayurannya sama, tetapi kaldu dari hewan tertentu sebagai campurannya yang membuat kaum muslim tidak bisa menikmati makanan itu. Untuk membedakannya dengan makanan yang bisa dimakan kaum muslim, toko yang menjual makanan halal selalu diberi tulisan “halal”.



**Foto 2 Kuliner Berlabel Halal**

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selain itu, produk olahan dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang berlabel halal dan dijual di toko atau swalayan juga dapat dijadikan pilihan.



**Foto 3 Produk dari Thailand yang Berlabel Halal**

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Faktor lain yang menjadi kendala yang dihadapi dalam upaya penyebaran bahasa Indonesia di Takeo adalah faktor geografis. Dengan alam yang panas dan gersang, Takeo menjadi provinsi yang jauh dari jangkauan wisatawan. Hal itu ditandai dengan tidak ada satu pun hotel di Takeo. Tempat penginapan yang ada adalah *guesthouse* atau hotel kecil. Dengan terbatasnya alat transportasi, membuat masyarakat Takeo sulit berkomunikasi dengan dunia luar. Di Takeo penulis tidak menemukan bus, baik ukuran kecil maupun besar. Moda transportasi taksi masih jarang.

Kondisi yang demikian memprihatinkan membuat penulis menyadari keterbatasan sebagai pengajar. Sebagai pengajar, ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh penulis, yaitu menyangkut hubungan diplomasi kedua negara. Sebenarnya untuk negara Kamboja, upaya pengajaran bahasa Indonesia sudah cukup baik, terutama di ibu kota negara, Phnom Penh. Seperti yang termuat dalam berita daring di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh yang berbunyi

“Upaya penyebarluasan penggunaan Bahasa Indonesia yang selama ini dilakukan oleh KBRI Phnom Penh melalui Pusat Budaya Indonesia (Pusbudi Nusantara) seolah mendapat tambahan energi luar biasa dengan datangnya empat guru pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Keempat guru BIPA tersebut merupakan bagian dari 80 orang pengajar BIPA yang dikirimkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) melalui Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) ke berbagai negara”. (<https://www.kemlu.go.id/phnompenh/id/berita-agenda/berita-perwakilan>).

Salah satunya adalah Regional Polytechnic Institute Techo Sen (RPITS) Takeo, kampus tempat penulis mengadakan pengamatan. Sayangnya, lokasi RPITS Takeo jauh dari ibu kota.

Upaya mempererat hubungan diplomatik antara dua negara ditandai dengan kegiatan yang dilakukan penulis, yaitu mendatangkan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh ke RPITS Takeo. Kedatangan KBRI Phnom Penh ke RPITST itu diterima oleh Kepala Kantor T-VET (*Technical Vocational*



*Education and Training*) dan Kepala Administrasi RPITS Takeo. Takeo, menurut Kepala Kantor T-VET RPITS, merupakan provinsi berpenduduk kurang lebih 39 ribu jiwa, disebut juga sebagai "*cradle of Khmer Civilization*" (<https://www.kemlu.go.id/phnompenh/id/berita-agenda/berita-perwakilan/>).

#### **4. Bahasa ASEAN**

Jika hubungan kedua negara sudah terbina dengan baik, diharapkan wacana bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN segera terwujud. Seperti yang dikemukakan oleh seorang akademisi Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, Simon Sabon, bahwa bahasa Indonesia memang layak menjadi bahasa pengantar di kawasan regional ASEAN. Hal itu terjadi karena menurut Sabon, bahasa Indonesia sudah lebih banyak penggunaannya (<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education>). Sabon juga mengatakan bahwa selain karena jumlah penuturnya lebih mendominasi daerah-daerah di kawasan ASEAN, bahasa Indonesia sangat mudah dipelajari dan dimengerti dibandingkan dengan bahasa lain, seperti bahasa Melayu.

Senada dengan pendapat tersebut, pakar bahasa dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Suhartono, mengatakan bahwa bahasa Indonesia mempunyai potensi menjadi bahasa pengantar di ASEAN (<https://m.liputan6.com/global/read>). Suhartono menambahkan bahwa ia meyakini bahasa Indonesia lebih berpotensi daripada bahasa Melayu karena setidaknya ada empat argumentasi yang ilmiah. Walaupun demikian, pemerintah masih perlu melakukan diplomasi. "Keempat argumentasi itu adalah bahasa Indonesia itu sudah banyak dipelajari di banyak negara, mudah dikuasai, laju perkembangannya fantastis, dan sebagian kosakatanya juga ada di dalam bahasa negara-negara ASEAN," kata Suhartono.

Dengan kondisi yang penulis alami ketika melaksanakan tugas pengajaran BIPA di Takeo, Kamboja, diharapkan wacana peran bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN bisa segera terwujud. Penulis mengharapkan agar kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN tidak sebatas wacana.

#### **PENUTUP**

Upaya pengenalan bahasa Indonesia di Takeo, Kamboja, melalui pengajaran BIPA dapat dikatakan cukup berhasil dengan materi ajar yang terbatas. Namun, penulis menemui beberapa kendala, di antaranya adalah faktor budaya yang berbeda, salah satunya adalah tenang keyakinan. Indonesia berpenduduk mayoritas beragama Islam dan berpenduduk minoritas agama lain, termasuk agama Buddha. Sementara itu, Kamboja berpenduduk mayoritas Buddha dan berpenduduk minoritas agama lain, termasuk agama Islam.

Faktor lain adalah faktor geografis. Takeo adalah daerah yang gersang, jauh dari ibu kota negara sehingga menyulitkan komunikasi masyarakat Takeo dengan dunia luar. Terakhir, faktor hubungan diplomasi dua negara. Hubungan keduanya sudah cukup baik. Mungkin hanya perlu ditingkatkan kualitasnya.

Penelitian ini merekomendasikan segera terbentuknya kamus bahasa Indonesia-Khmer dan Khmer-Indonesia sebagai pendukung upaya perwujudan wacana bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN.



## DAFTAR PUSTAKA

- Budihastuti, Exti. (2017a). "Metode Audio-Lingual pada Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa Regional Polytechnic Institute Techno Sen Takeo, Kamboja." Makalah pada Seminar Pengajaran Bahasa, Universitas Indonesia. FIB UI 2017.
- (2017b). "Kompetensi Interkultural di Kampus Regional Polytechnic Institute Techno Sen Takeo, Kamboja: Pengenalan Budaya Indonesia dan Kamboja" Makalah pada Seminar Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya Universitas Jember.
- (2017c). "Analisis SWOT tentang Pergerakan Bahasa Melayu di Takeo Sebagai Upaya untuk Mengenalkan Bahasa Indonesia di Kamboja." Makalah Seminar *Language Maintenance and Shift*, Universitas Diponegoro.
- (2017d). "Analisis Kesalahan berbahasa Bidang Fonologi pada Pemelajar BIPA Prapemula di Regional Polytechnic Institute Techo Sen Takeo, Kamboja." Makalah pada Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia pada Penutur Asing X. <https://m.liputan6.com/global/read/3042548/> (diakses tanggal 27 Mei 2018). <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/01/25/o1i0if368-> (diakses tanggal 28 Mei 2018). <http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/16/02/17/o2om87> (diakses tanggal 27 Mei 2018). <https://www.kemlu.go.id/phnompenh/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/> (diakses tanggal 27 Mei 2018). [https://www.kemlu.go.id/phnompenh/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages](https://www.kemlu.go.id/phnompenh/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/) (diakses tanggal 27 Mei 2018).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V Versi Daring.*
- PPSDK. (2016). Laporan Pengajaran BIPA di Kamboja Tahun 2016.
- Zulfikar, Achmad. (2013). "Bahasa Indonesia sebagai Embrio Bahasa ASEAN (Peluang dan Tantangan Menuju ASEAN Community 2015)." Dalam Kumpulan *Kongres Bahasa Indonesia X*.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Exti Budihastuti  
Judul makalah : Pengenalan Bahasa Indonesia di Kamboja melalui Pengajaran BIPA: Perwujudan Wacana Bahasa Indonesia sebagai Bahasa ASEAN  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.00  
Moderator : Dony Setiawan, S.S., M.Pd.  
Pencatat : 1. Septimariani  
2. Vita Luthfia Urfa

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional/bahasa ASEAN. Wawancara dalam penelitian di Kamboja dilakukan kepada guru, pegawai kantin, dan siswa selama pemakalah mengajar di Takeo. Dalam penelitian itu diketahui bahwa masyarakat Takeo belum mengenal Indonesia.
2. Faktor budaya menjadi faktor penghambat pada saat pemakalah berada di Kamboja. Pengajaran BIPA dimulai dengan mengenalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu pengenalan diri, pengenalan alfabet, pengenalan angka, dan pengucapan salam serta penggunaan alat peraga berupa bola dunia.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Dewi Kusumaningsih  
Instansi : UPN Sukoharjo

**Pertanyaan:**

Apakah capaian dari informan dalam penelitian ini? Mengapa tujuannya adalah untuk membuat kamus bahasa Khmer yang berbeda latar belakangnya dengan bahasa Indonesia? Lalu, untuk apa belajar bahasa Indonesia?

**Jawaban:**

Seharusnya dalam penelitian ini memang dilakukan survei dan diketahui dahulu lokasi geografis penelitian. Pengajaran BIPA di sana dilakukan sebanyak delapan kali pertemuan. Bahan ajarnya mencakup pengenalan abjad, salam, benda-benda sekitar, nama hari, dan nama bulan.

**Penanya 2**

Nama : Reza  
Instansi : Pusat Pembinaan

**Pertanyaan:**

Apa target dan tujuan yang ingin dicapai ketika mengajar BIPA di sana?



**Jawaban:**

Target pengajaran BIPA di sana adalah mengenalkan kosakata bahasa Indonesia dengan cara mengajarkan abjad dan hari secara berulang-ulang setiap hari.

**Penanya 3**

Nama : Prima  
Instansi : Universitas Negeri Surabaya

**Pertanyaan:**

Untuk informasi yang lebih konkret, apakah ada matriks tahapan perencanaan pembelajaran selama empat bulan?

**Jawaban:**

Pengalaman empat bulan di Kamboja memang cukup singkat untuk memperkenalkan bahasa Indonesia dan memang mustahil untuk memenuhi semua target dengan hanya delapan kali pertemuan efektif. Buku yang dibuat untuk pembelajar BIPA adalah untuk tingkat prapemula dan memang belum diterbitkan. Buku materi yang digunakan di Takeo menggunakan materi bergambar.

**Isu-Isu Penting:**

1. Pengajar BIPA di Kamboja harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga dapat menghasilkan kamus Khmer karena pembuatan kamus tidak mudah.
2. Pengenalan bahasa Indonesia di Kamboja melalui pengajaran BIPA dilakukan agar pembelajar dapat mengenal teks yang sudah dibaca.
3. Pengajar BIPA harus dibekali buku bahan ajar prapemula untuk pembelajar di Kamboja dan Moskow agar proses pembelajaran lebih mudah. Perkenalan untuk pembelajar dimulai dengan cara yang sederhana.
4. Pengajar BIPA diberi kurikulum pembelajaran dari PPSDK yang dapat dikembangkan. Kurikulum itu sebaiknya disusun dari hal-hal terdekat. Bahan ajar disesuaikan dengan kondisi dan materi yang diberikan, yaitu berupa teks narasi, dialog, formulir, tiket, dan KTP. Hasil pembelajaran dapat memberikan informasi kepada para pembaca dan para penyusun bahan ajar BIPA.



**7. Studi Evaluatif Bahan Ajar Membaca Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Tingkat Pemula di Moscow, Rusia**  
**STUDI EVALUATIF BAHAN AJAR MEMBACA**  
**BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) TINGKAT**  
**PEMULA DI MOSCOW, RUSIA**

**Mochamad Whilky Rizkyanfi**

Universitas Pendidikan Indonesia

Jalan Setiabudhi No. 229, Isola, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154

Pos-el: wilkysgm@gmail.com

**Abstrak**

Penulisan ini didorong oleh kelangkaan bahan ajar BIPA yang tepat guna. Sebenarnya, orang asing yang berkeinginan untuk mempelajari bahasa Indonesia sangat banyak. Oleh karena itu, masalah dasar pada penulisan adalah (1) materi apa yang menarik untuk teks bacaan BIPA di tingkat pemula? (2) apa jenis teks yang sesuai dalam mengajarkan bahan bacaan BIPA? (3) apa jenis latihan membaca untuk tingkat pemula BIPA? Tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan (1) materi yang menarik untuk teks bacaan BIPA tingkat pemula; (2) jenis teks yang sesuai dengan BIPA tingkat pemula; dan (3) jenis latihan membaca tingkat pemula BIPA. Makalah ini disusun dengan menggunakan metode evaluatif kualitatif. Berdasarkan hasil penulisan dapat disimpulkan bahwa (1) materi yang berarti untuk membaca teks adalah materi yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari; (2) seluruh jenis teks, termasuk tiket, kupon, KTP (kartu tanda penduduk) bisa dijadikan bacaan untuk tingkat pemula, tetapi penggunaannya harus sesuai dengan kebutuhan; (3) semua jenis latihan membaca bisa digunakan untuk belajar. Oleh karena itu, berdasarkan temuan empiris penulisan ini dapat diketahui bahwa pemelajar melakukan yang terbaik saat menjawab pertanyaan yang dimaksud dengan tipe *benar* atau *salah*.

**Kata-kata kunci:** studi evaluatif, bahan ajar membaca, BIPA, tingkat pemula.

**Abstract**

*This writing is driven by the scarcity of appropriate Indonesia for Speaker of Other Languages (ISOL) teaching materials. Actually, the desire of foreigners to learn Indonesian very much. Therefore, the basic problem in writing, namely 1) What topic is interesting for ISOL text reading at the basic level? 2) What kind of text is appropriate in teaching ISOL reading material? The purpose of this paper is to describe 1) an interesting topic for basic level BIPA reading texts; 2) the type of text that corresponds to the basic level BIPA; and 3) BIPA basic level reading practice. This paper is prepared using qualitative evaluative methods. 3) What kind of reading practice for ISOL basic level? Based on the results of the writing, when the authors conducted trials of ISOL learners at the basic level, it can be concluded that: 1) The meaningful topic to read the text is the topic faced by learners in everyday life; 2) All types of texts, including tickets, coupons, ID cards (identity cards) and so forth can be used as reading material for the basic level. Nevertheless, the use must be in accordance with the needs; 3) All kinds of reading exercises can be used for learning. Therefore, based on the empirical*



*findings of this writing it can be seen that the learner performs the best when answering the question is the type True or False.*

**Keywords:** *evaluative study, reading material, BIPA, basic level.*

## **PENDAHULUAN**

Bahasa Indonesia saat ini belum memiliki tingkat popularitas seperti bahasa-bahasa asing lain yang ada di dunia. Ini memang wajar karena bahasa Indonesia memang belum mencapai usia 100 tahun (Rusli, 1994: 1). Namun, sekarang ini, dengan era globalisasi yang makin berkembang, bahasa Indonesia mulai dilirik oleh bangsa-bangsa lainnya. Bangsa lain tersebut saat ini telah mengetahui sepenuhnya bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Indonesia. Hal tersebut berdampak baik bagi kemandirian bahasa Indonesia sebagai bahasa utama penutur asli Indonesia.

Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia membawa kemajuan yang cukup pesat dalam peningkatan kemandirian bangsa Indonesia. Hal tersebut terbukti dari banyaknya warga negara asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Data di lapangan ternyata menunjukkan bahwa peminat bahasa Indonesia makin hari makin bertambah banyak. Kepala Biro PKLN, Suharti, mengungkap tren peningkatan jumlah peminat Program Darmasiswa Indonesia dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, sejak diselenggarakan pada tahun 1974, program ini telah menghasilkan sekitar 7.215 alumni dari 117 negara sahabat. Untuk tahun ajaran 2017/2018, BPKLN telah berhasil menjaring 1.087 pendaftar dari 130 negara (Kemendikbud, 2017). Pemberian Beasiswa Darmasiswa ini salah satunya ditujukan untuk orang asing yang berminat mengikuti program studi bahasa Indonesia, selain pariwisata, kesenian dan kebudayaan, serta kuliner.

Selain itu, Rusia sebagai lokasi penelitian penulis, di sana terdapat universitas dan lembaga yang menyelenggarakan kursus BIPA, antara lain, meliputi (1) ISAA Moscow State University dengan jumlah siswa 24 orang, (2) KBRI Moscow dengan jumlah siswa 14 orang, dan (3) The Academy of Public Administration dengan jumlah siswa 14 orang. Jumlah tersebut belum ditambah dengan beberapa universitas yang menyelenggarakan program BIPA, tetapi penulis tidak turut serta mengajar di universitas tersebut.

Jumlah yang makin banyak tersebut tentu saja berimbas pada pengembangan materi ajar BIPA yang harus menarik dan mudah dipelajari oleh seluruh pemelajarnya. Salah satunya adalah dengan memilih bahan sebagai variasi dalam materi ajar membaca. Membaca memang sangat penting dalam BIPA. Tarigan (1988: 136) memaparkan bahwa membaca merupakan satu di antara keterampilan dalam pengajaran bahasa yang berkaitan erat dengan kualitas dan hasil pengajaran bahasa Indonesia.

Akan tetapi, kabar baik tentang peningkatan jumlah pemelajar BIPA tersebut kurang diimbangi dengan banyaknya materi ajar yang tersebar luas di lapangan. Jarangnya buku ajar yang dapat dibeli bebas oleh pemelajar BIPA membuat kualitas pengajaran BIPA di lapangan menjadi sedikit terhambat. Saat ini, PPSDK memang tengah menerbitkan berbagai buku ajar untuk program pengajaran BIPA di luar negeri, tetapi bukan berarti para praktisi dan pegiat BIPA menjadi terhambat kreativitasnya untuk membuat bahan ajar sesuai pertimbangan pribadi di instansinya.





Kemunculan berbagai buku tersebut tentu saja menjadi kabar baik dalam pengajaran BIPA di Indonesia. Namun, tentu saja dalam penyajian materi yang ada di dalamnya terdapat beberapa hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari buku tersebut. Kekuatan dan kelemahan buku tersebut dapat ditemukan saat kita menggunakannya sebagai materi ajar. Satu di antara yang penulis temukan ialah tema yang diusungnya kurang menasional, terkesan bersifat kedaerahan.

Keterampilan membaca sangat penting di samping tiga keterampilan berbahasa lainnya. Seseorang mengetahui hal-hal yang baru salah satunya adalah karena ia membaca. Tidak luput pula keterampilan membaca untuk BIPA. Bila kita mengategorisasikan pemelajar BIPA tingkat pemula setara dengan siswa setingkat sekolah dasar, hal tersebut berarti kita dapat menggeneralisasikan pula bahwa untuk materi ajarnya pun, terutama materi ajar membaca, kita dapat memberikan buku-buku atau majalah-majalah khusus anak. Akan tetapi, karena biasanya pemelajar BIPA tingkat pemula itu sudah dewasa, pemberian materi yang bersumber dari buku-buku atau majalah anak-anak pun dirasakan tidak tepat.

Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk memberikan materi ajar membaca bagi pemelajar BIPA. *Pertama*, dengan memberikan bahan ajar yang autentik, tidak diubah sedikit pun, apa adanya jika diambil dari sumber-sumber lain, seperti majalah, koran, atau buku-buku yang lainnya. *Kedua*, dengan memberikan materi ajar membaca yang telah disadur atau teks membaca yang disajikan telah disesuaikan dengan tingkat kesulitan pemelajar BIPA tingkat pemula. *Terakhir*, dengan memberikan materi ajar yang disusun autentik dari pengajarnya sendiri berdasarkan kebutuhan pemelajarnya.

Melihat fenomena seperti itu, penulis merasa penting untuk menyusun salah satu materi ajar BIPA, yakni materi ajar membaca yang merupakan salah satu faktor penting dalam pengajaran BIPA karena dalam materi ajar membaca kita dapat pula memberikan materi budaya tertentu dalam bacaan (Purnomo, 1994: 332). Materi ajar disajikan sebagai bahan penulisan dengan mengacu pada tiga cara pembuatan materi ajar yang telah dijelaskan sebelumnya.

## LANDASAN TEORI

### 1. Membaca sebagai Salah Satu Aspek Keterampilan Berbahasa

#### 1.1 Pengertian Membaca

Pada zaman modern ini membaca menjadi kegiatan yang sangat penting seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyebaran ilmu pengetahuan dapat dilakukan melalui bermacam media, baik secara lisan maupun melalui pembacaan teks atau wacana tulis yang berbentuk naskah, selebaran, surat kabar, buku, majalah, dan sebagainya. Kegiatan membaca mutlak diperlukan untuk memahami seluruh informasi yang terdapat dalam teks yang berbentuk wacana.

Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan membaca, penulis mencoba menjelaskan berbagai hal mengenai kegiatan membaca tersebut dengan berlandaskan kepada para ahli.

- 1) Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis (Tarigan, 1985: 7).
- 2) Membaca ialah memahami pola-pola bahasa dari gambaran tertulisnya (Lado dalam Tarigan, 1985: 9).



- 3) Membaca adalah melihat tulisan dan mengerti atau dapat melisankan apa yang tertulis itu (KBBI, 2003: 71).

### **1.2 Manfaat Membaca**

Beberapa manfaat membaca yang berdampak bagi perkembangan sebagian besar jenis kecerdasan, di antaranya, adalah sebagai berikut:

- 1) mampu meningkatkan penguasaan kosakata dan pengetahuan akan tata bahasa dan sintaksis;
- 2) mengajak kita untuk merefleksikan diri dan melontarkan pertanyaan serius mengenai nilai, perasaan, dan hubungan kita dengan orang lain;
- 3) meningkatkan daya khayal; dan
- 4) menstimulus munculnya minat terhadap bidang-bidang terkait.

## **2. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)**

Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua sangat digemari oleh pemelajar asing dari berbagai kalangan sebagai penunjang kebutuhan atau karier mereka ke depannya, seperti untuk dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, atau banyak pula pemelajar dengan tujuan yang lebih terarah, antara lain, melanjutkan studi di Indonesia, mengembangkan bisnis tertentu di Indonesia, mendalami bahasa Indonesia, atau menggali kehidupan masyarakat dan budaya di Indonesia.

Berdasarkan pada hal tersebut, terdapat tiga tujuan BIPA bagi pemelajar, yakni menguasai keterampilan komunikasi antarpersonal dasar (*basic interpersonal communication skills*); menguasai konsep serta prinsip-prinsip yang bersifat ilmiah (*cognitive academic language proficiency*); serta mendalami kebudayaan dengan seluruh detail yang terdapat di dalamnya. Semua tujuan tersebut dapat diperoleh, baik secara diskret maupun integratif.

Bagi penutur asing yang belajar untuk memperoleh dan mengembangkan kecakapan berbahasa Indonesia, yang harus dipelajari terutama adalah sistem bahasa Indonesia dengan pemakaiannya.

### **2.1 Pengantar Bahan Ajar BIPA**

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), pemilihan materi ajar merupakan hal yang sangat penting. Pengajar BIPA harus pandai memilih dan menentukan materi yang akan diajarkan sesuai dengan prioritas kepentingan pemelajar BIPA.

Dalam KBBI (2002: 87), materi ajar adalah ‘segala sesuatu yang dapat dipakai atau dijadikan pedoman atau pegangan untuk mengajar’. Bistok (1994: 17) mengemukakan beberapa teori mengenai materi ajar BIPA sebagai berikut.

- 1) Setiap penulisan materi pelajaran BIPA harus dilandasi teori linguistik dasar. Parameter teori linguistik dasar itu akan digunakan sebagai pedoman pada pemilihan bahan, misalnya, dalam pemilihan ragam bahasa (baku, formal, informal) dan pemilihan medium (lisan atau tulis).
- 2) Parameter lain yang perlu diperhatikan ialah bahan pelajaran BIPA hendaknya diorientasikan tidak hanya pada bahasa (kasus linguistik), tetapi juga pada asas jati diri. Bahasa Indonesia harus dilihat sebagai subjek. Selain itu, bahan pelajaran BIPA hendaknya memperhatikan tingkat perkembangan kognitif siswa dan tingkat keterbacaan siswa tersebut.

Selain itu, menurut Widharyanto (2001: 18) ada tiga isu yang menjadi polemik perdebatan tentang materi ajar, yakni



- 1) materi ajar yang disusun dan diproduksi oleh pengajar BIPA;
- 2) materi ajar yang diambil dari bahan-bahan yang ada dalam komunikasi sehari-hari dan mengalami modifikasi seperlunya oleh pengajar; dan
- 3) materi ajar yang ada dalam komunikasi sehari-hari tanpa mengalami modifikasi sama sekali.

Berdasarkan pada hal tersebut, materi ajar BIPA dapat diklasifikasikan atas materi ajar buatan guru, materi ajar saduran, dan materi ajar yang autentik. Penggunaan jenis materi ajar tersebut disesuaikan dengan tingkat atau level pemelajar. Pada pemelajar BIPA tingkat pemula, pengajar dapat menggunakan materi ajar buaatannya sendiri pada pertemuan-pertemuan awal.

Materi ajar yang dibuat oleh pengajar cenderung mempunyai tingkat kesulitan yang lebih rendah dibandingkan dengan materi ajar saduran atau materi ajar yang autentik. Bahan ajar yang termasuk jenis pertama dapat dibuat oleh pengajar BIPA sesuai dengan tingkatan pemelajar. Widharyanto (2003: 18) memaparkan bahwa pengajar BIPA dengan seluruh imajinasinya dapat membuat materi ajar dengan segala bakat dan kemampuan yang telah dimilikinya. Sementara itu, materi yang kedua adalah materi yang bisa diadaptasi dari proses komunikasi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, seperti percakapan atau dialog di radio atau TV, pengumuman di masjid, undangan hajatan, iklan di majalah, berita dalam surat kabar, dan format atau slip isian dari bank. Akan tetapi, materi tersebut tentu saja telah dimodifikasi oleh pengajar sesuai dengan tujuan tertentu. Materi yang ketiga adalah materi autentik yang tidak diubah atau tanpa "campur tangan" pengajar. Bahan ini cenderung memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis materi pertama dan kedua.

## **2.2 Ihwal Materi Ajar Membaca BIPA**

Menurut Setiadi (2000: 129), pada dasarnya ada dua kemampuan yang dapat dikuasai dalam pembelajaran membaca, yaitu pengenalan kata (*word recorginition*) dan pemahaman (*comprehension*). Pengenalan kata biasanya ditekankan dalam pembelajaran menulis permulaan, terutama untuk memperkenalkan pemelajar pada bunyi (*phonic and phonemic awareness*). Tentunya berbagai pendekatan dapat digunakan dalam pengajaran membaca permulaan (BIPA). Namun, sebaiknya pendekatan kebermaknaan lebih ditekankan karena pada prinsipnya membaca itu adalah menciptakan dan memahami makna dan gagasan yang diungkapkan oleh penulis. Oleh karena itu, kegiatan membaca teks sederhana merupakan langkah efektif yang dapat membantu pemelajar menjadi pembaca bahasa asing yang efektif.

## **2.3 Evaluasi Bahan Ajar Membaca BIPA**

### **2.3.1 Tipe-tipe Soal Evaluasi Bahan Ajar Membaca**

Tipe soal evaluasi yang digunakan dalam penulisan ini ada tiga jenis, yakni soal pilihan dua (B-S), soal pilihan ganda (PG), dan soal isian singkat.

- 1) Benar-Salah adalah soal objektif yang pilihannya dua dan tugas siswa memilih satu di antaranya.
- 2) Pilihan Ganda adalah soal objektif yang pilihannya lebih dari satu, biasanya tiga sampai dengan lima pilihan, dan tugas siswa memilih jawabannya berdasarkan petunjuk soalnya.
- 3) Isian Singkat adalah soal yang jawabannya berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat lengkap.



### 2.3.2 Jenjang Evaluasi Pemahaman Wacana

Aspek pemahaman isi wacana dalam evaluasi bahan ajar berkaitan dengan aspek kognitif dengan berbagai jenjangnya. Untuk mengukur tingkat pemahaman yang lengkap dari sumber data, evaluasi hendaknya mencakup jenjang kognitif, yaitu jenjang ingatan, jenjang pemahaman, jenjang aplikasi, dan jenjang analisis. Adapun jenjang tingkat kognitif dalam evaluasi bahan ajar membaca ini, antara lain, sebagai berikut.

- 1) Evaluasi Pemahaman Wacana Jenjang Ingatan  
Evaluasi jenjang ingatan hanya menuntut peuji untuk mengenali atau mengingat kembali fakta-fakta atau konsep yang sederhana. Pada prinsipnya peuji diminta untuk memaparkan bukti-bukti atau konsep sederhana yang terdapat dalam wacana pada proses membaca yang telah dilakukannya.
- 2) Evaluasi Pemahaman Wacana Jenjang Pemahaman  
Dalam evaluasi jenjang pemahaman peuji dituntut memahami isi wacana yang meliputi pemahaman hubungan antarkonsep, hubungan sebab akibat, hubungan antarfakta atau konsep, dan membedakan antarkonsep. Perlu ditekankan bahwa untuk menguji pemahaman hendaknya digunakan bahasa yang tidak sama dengan bahasa dalam wacana.
- 3) Evaluasi Pemahaman Wacana Jenjang Aplikasi  
Dalam evaluasi jenjang aplikasi peuji dituntut mempunyai keterampilan untuk memilah suatu konsep abstraksi tertentu (konsep, hukum, dalil, aturan, gagasan, cara, dan sejenisnya) secara tepat yang selanjutnya dapat diterapkan dalam suatu suasana baru serta dapat mengaplikasikannya. Dalam evaluasi tingkat ini, subjek peuji dituntut untuk menerapkan konsep yang telah dikenal dan dipahaminya dengan situasi lain.
- 4) Evaluasi Pemahaman Wacana Jenjang Analisis  
Dalam evaluasi jenjang ini peuji dituntut untuk mampu melakukan penganalisisan data-data khusus, pengidentifikasian, serta melakukan pembedaan informasi tertentu dalam wacana dan hubungan antarsituasi.

### 3. Model-Model Penelitian Evaluatif

Berikut ini akan dipaparkan beberapa model yang dapat diterapkan sebagai strategi atau pedoman kerja dalam melaksanakan penelitian evaluatif.

#### 3.1 Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang berperan dalam pengambilan keputusan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan suatu program. Daniel Stufflebeam dan kawan-kawannya pada tahun 1968 di Ohio State University mengembangkan model CIPP yang diambil dari akronim *context evaluation, input evaluation, process evaluation, dan product evaluation* dan berorientasi pada pengambilan keputusan. Konteks evaluasi ini membantu dalam hal perencanaan keputusan, penentuan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, serta perumusan tujuan program (Tayibnapis, 1989). Evaluasi konteks ini menggambarkan latar belakang program yang dievaluasi, memberikan perkiraan kebutuhan dan tujuan program, menentukan sasaran program, dan menentukan sejauh mana tawaran ini cukup responsif terhadap kebutuhan yang sudah diidentifikasi (Edison, 2009). Evaluasi konteks ini berkaitan dengan



- a. analisis masalah/kebutuhan yang berhubungan dengan lingkungan; suatu kebutuhan diracik sebagai suatu kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi yang diinginkan dan
- b. mendeskripsikan secara jelas dan detail tentang tujuan program yang akan memperkecil kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi yang diharapkan.

Dengan singkat dapat dikemukakan bahwa evaluasi konteks adalah evaluasi terhadap kebutuhan-kebutuhan, tujuan pemenuhan kebutuhan, serta karakteristik individu yang melaksanakan evaluasi.

*Input evaluation, structuring decision* adalah evaluasi yang membantu peneliti dalam hal pengaturan keputusan, penentuan sumber-sumber yang ada, pengambilan alternatif, perencanaan serta penyusunan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan penyusunan prosedur kerja untuk mencapainya (Tayibnapi, 1989). Evaluasi ini digunakan dalam pelaksanaan program, penjadwalan, dan prosedur pelaksanaannya. Edison (2009) memaparkan bahwa evaluasi masukan dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menilai relevansi rancangan program, strategi yang dipilih, prosedur, sumber yang berupa manusia (guru dan siswa) atau mata pelajaran serta sarana prasarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Singkatnya, masukan (*input*) merupakan model yang digunakan untuk menentukan cara agar penggunaan sumber daya yang ada dapat mencapai tujuan serta secara esensial memberikan informasi tentang apakah perlu mencari bantuan dari pihak lain atau tidak. Aspek masukan juga membantu menentukan prosedur dan desain untuk menerapkan program.

*Process evaluation, to serve implementing decision* adalah evaluasi proses untuk menolong dalam menerapkan putusan. Begitu pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dipantau, dikontrol, dan direvisi (Tayibnapi, 1989). Evaluasi proses digunakan untuk membantu memberikan dan menyediakan informasi balikan dalam rangka mengimplementasikan keputusan tentang sejauh mana rencana-rencana atau tindakan-tindakan yang hendak dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program sudah sesuai dengan prosedur dan penjadwalan yang ditetapkan. Evaluasi proses dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana program telah diimplementasikan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas, pengalaman belajar apa saja yang telah diperoleh peserta didik, serta bagaimana kesiapan guru dan siswa dalam implementasi program tersebut dan untuk memperbaiki kualitas program dari program yang berjalan serta memberikan informasi sebagai alat untuk menilai apakah sebuah proyek relatif sukses/gagal (Edison, 2009).

*Product evaluation, to serve recycling decision* adalah evaluasi produk yang bertujuan untuk membantu membuat putusan selanjutnya. Edison (2009) memaparkan bahwa evaluasi produk mengakomodasi informasi untuk meyakinkan dalam kondisi apa tujuan dapat dicapai dan juga untuk menentukan jika strategi yang berkaitan dengan prosedur dan metode yang diterapkan guna mencapai tujuan sebaiknya dihentikan, dimodifikasi, atau dilanjutkan dalam bentuk yang seperti sekarang. Evaluasi produk meliputi penentuan dan penilaian dampak umum dan khusus suatu program, pengukuran dampak pencegahan, pengidentifikasian dampak yang tidak dapat dicegah, perkiraan kebaikan program, serta pengukuran efektivitas program. Evaluasi produk digunakan untuk a) membantu pengambilan keputusan selanjutnya, seberapa besar hasil yang telah



dicapai dan apa yang akan dilakukan setelah program dilaksanakan dan b) mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Model evaluasi untuk mengambil keputusan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan suatu program dilakukan dengan menggunakan evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk.

### 3.2 Model Evaluasi UCLA

Alkin (dalam Tayibnapi, 1989) memaparkan bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk meyakinkan putusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dan memilih beberapa alternatif. Alkin mengemukakan lima macam evaluasi, yaitu *system assessment*, *program planning*, *program implementation*, *program improvement*, dan *program certification*. *System assessment* memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem. Sistem ini berfungsi memberikan informasi mengenai keadaan atau profil program. *Program planning* membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. *Program implementation* menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan. *Program improvement* memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan; apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul takterduga. *Program improvement* berfungsi memberikan informasi tentang bagaimana program tersebut bermanfaat dan bagaimana program dapat dilaksanakan. *Program certification* memberi informasi tentang nilai guna program.

### 3.3 Model Evaluasi Brinkerhoff

Model yang dikembangkan oleh Brinkerhoff, dkk. (1983) ini mencakup tiga jenis desain sebagai berikut.

- 1) *Fixed vs Emergent Evaluation Design*. Desain *fixed* dipastikan pilihannya secara sistematis dan desainnya dikembangkan dengan mengacu pada tujuan program. Rencana analisis dibuat sebelumnya, yakni si pemakai akan menerima informasi sebagaimana telah ditentukan dalam tujuan. Strategi pengumpulan informasi dalam desain ini menggunakan tes, angket, dan lembar wawancara. Berbeda dengan desain *fixed*, desain *emergent* dibuat dengan maksud menangkap fenomena yang sedang berlangsung yang berpengaruh terhadap program seperti masukan-masukan baru. Pada prinsipnya, desain ini terus berkembang sesuai dengan kondisi dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.
- 2) *Formative vs Summative Evaluation*. Evaluasi formatif dipakai untuk mendapatkan data bagi keperluan revisi program, sedangkan evaluasi sumatif dibuat untuk menilai kegunaan suatu program. Pada evaluasi sumatif fokus evaluasi ditujukan pada variabel-variabel yang dipandang penting dan berkaitan dengan kebutuhan pengambilan keputusan.
- 3) Desain Eksperimental dan Kuasi Eksperimental vs *Natural Inquiry*. Desain eksperimental, kuasi eksperimental, dan *natural inquiry* ini merupakan hasil adopsi dari disiplin penelitian. Desain eksperimental dan kuasi eksperimental digunakan untuk menilai suatu program yang baru diujicobakan. Sementara itu, *natural inquiry* dilakukan dengan cara evaluator terlibat langsung dengan sumber-sumber informasi serta program yang dilaksanakannya.



### 3.4 Model Evaluasi Stake

Model ini dikembangkan oleh Stake. Analisis proses evaluasi yang ditelitinya memberikan pengaruh yang cukup besar dalam bidang ini dan meletakkan dasar yang sederhana, tetapi merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu *descriptions* dan *judgement* dan membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan, yaitu *antecedents (context)*, *transaction (process)*, dan *outcomes (output)* (Tayibnapi. 1989). Tahap pendahuluan (*antecedents*) menyangkut kondisi yang terlebih dahulu ada sampai pada saat dilakukan instruksi yang dihubungkan dengan hasil yang dicapai. Tahap transaksi (*transactions*) menyangkut proses dilakukannya instruksi dan hasil yang diperoleh adalah karena pengaruh dari proses tersebut. Tahap *outcomes* menyangkut hasil yang dicapai setelah program diimplementasikan serta untuk menentukan langkah kerja selanjutnya. Penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini ialah evaluator membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stake mengatakan bahwa *description* di satu pihak berbeda dengan *judgement* atau menilai. Dalam model ini, *antecedents*, *transaction*, dan *outcomes*, data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut, untuk menilai manfaat program.

Dari beberapa model penelitian evaluatif yang dipaparkan, penulis memilih Model Evaluasi Stake dalam penelitian sederhana ini dengan beberapa pertimbangan, yakni alokasi waktu yang tidak memadai dan jumlah data yang terbatas.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode evaluatif kualitatif. Evaluatif dimaksudkan sebagai analisis yang dilakukan terhadap bahan ajar membaca BIPA tingkat pemula. Variabel dalam penelitian ini meliputi *antecedents (context)*, *transaction (process)*, dan *outcomes (output)*. Penulis berusaha menemukan bahan ajar membaca program BIPA untuk tingkat pemula yang cocok dengan pola pengajaran yang diterapkan pada program BIPA tingkat pemula dengan sumber data sebagai berikut:

- a) bahan ajar membaca serta pelatihannya dan
- b) wawancara informal.

Penulisan ini dikatakan sebagai penulisan evaluatif kualitatif karena menilai serta mempertimbangkan penyusunan materi ajar membaca BIPA tingkat pemula dengan proses kualitatif. Selain itu, penulisan ini berkaitan erat dengan kelemahan yang mendasar pada penulisan-penulisan program BIPA, yakni kurang memadainya sumber data yang diperlukan dalam sebuah penulisan BIPA dan alokasi waktu yang sangat terbatas. Dalam hal ini, penulis hanya bisa melakukan uji coba bahan ajar pada pemelajar BIPA KBRI Moscow, Rusia. Karena kelemahan itulah, penulisan ini tidak bisa digeneralisasikan. Dalam penulisan ini, materi ajar disusun berdasarkan tema dan hal-hal lain, seperti pelajaran kosakata dan tata bahasa yang disesuaikan dengan silabus terstandar BIPA nasional.

Selain itu, dalam penulisan ini dilakukan upaya untuk mengungkap dan menggali pandangan pemelajar terhadap materi ajar yang disusun dan dikembangkan dengan cara wawancara.



## PEMBAHASAN

### 1. Temuan

Berdasarkan hasil uji coba materi ajar yang dilakukan terhadap siswa BIPA di KBRI Moscow, berikut akan dipaparkan hasil temuan penulis berdasarkan variabel model evaluasi Stake.

#### a. *Antecedents (Context)*

Materi ajar membaca BIPA yang disusun penulis merupakan hasil analisis penulis terhadap kurikulum yang sudah disusun PPSDK. Namun, kurikulum tersebut dikembangkan dan dipilih yang sesuai dengan konteks materi ajar membaca BIPA tingkat pemula. Konteks dikembangkan dengan melihat kondisi siswa BIPA di KBRI Moscow. Siswa BIPA merupakan pemelajar dari masyarakat Moscow yang berada dalam berbagai usia dan profesi. Total pemelajar BIPA yang diajar oleh penulis adalah 7—8 orang, tetapi yang sering masuk ke dalam kelas hanya 4 atau 5 orang sehingga uji coba materi ajar membaca ini biasanya dilakukan kepada pemelajar tersebut, yakni Julie Rizhaya, Edward, Olga Federova, dan Natalia Rudik.

Materi ajar yang dikembangkan disusun dari hal-hal yang terdekat dengan pemelajar sampai ke materi-materi yang cukup jauh. Namun, materi tersebut tetap mengacu pada kurikulum yang dikembangkan. Materi-materi tidak terbatas pada teks, tetapi pada hal-hal yang secara kontekstual digunakan pada kehidupan sehari-hari di Indonesia dengan alasan bahwa materi ajar tersebut dapat juga dijadikan sebagai modal dasar saat pemelajar BIPA berkunjung ke Indonesia. Adapun tema yang diambil penulis dalam materi ajar tersebut adalah Perkenalan, Aktivitas Sehari-hari, Berbelanja, Kependudukan, Kesehatan, Pelayanan Umum, Transportasi, dan Daerah Wisata. Kedelapan tema tersebut diambil dengan mempertimbangkan kedekatan informasi dengan pemelajar BIPA.

Berdasarkan hasil uji coba ditambah dengan wawancara secara informal didapatkan informasi bahwa pemelajar BIPA mendapatkan manfaat dari tema-tema ini. Selain itu, siswa BIPA pun cenderung tidak mengalami kesulitan yang berarti. Kesulitan yang diperoleh adalah terdapat beberapa kosakata yang belum diketahui sehingga pada saat pembelajaran berlangsung, pemelajar BIPA dan penulis melakukan diskusi tentang kata tersebut serta penerapannya pada kehidupan sehari-hari di Indonesia.

#### b. *Transaction (Process)*

Proses penelitian evaluasi terhadap materi ajar ini dilakukan tidak secara intensif pada setiap pertemuan, tetapi diselangi dengan materi ajar yang terdapat pada buku ajar yang diberikan oleh PPSDK. Materi ajar membaca ini diberikan secara langsung untuk dibahas pada saat itu atau pun diberikan sebagai pekerjaan rumah untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya. Proses kajian terhadap materi ajar ini dilakukan dengan mempertimbangkan korelasi dengan topik yang diberikan pada buku ajar PPSDK.

Pada setiap pemberian materi ajar membaca ini, pemelajar BIPA dihadapkan dengan materi yang temanya berbeda dengan jenis teks dan evaluasi yang berbeda pula. Jenis teks yang diberikan berupa teks narasi dan teks dialog. Selain itu, tidak hanya teks bacaan, dalam bahan ajar membaca BIPA tersebut, penulis memberikan contoh formulir, tiket, dan KTP yang secara kontekstual digunakan di Indonesia. Saat pembelajaran berlangsung, penulis sekaligus mewawancarai pemelajar BIPA bagaimana kenyamanan dan tingkat kesulitan saat materi ajar





membaca tersebut digunakan oleh pemelajar BIPA. Sebagai temuan, pemelajar BIPA lebih menyenangi materi *Berbelanja* karena rata-rata siswa di kelas ini sangat suka makanan-makanan Indonesia sehingga saat berlangsung diskusi tentang makanan, siswa kelas ini cenderung lebih aktif dan tertarik dengan materi yang diberikan. Mengenai jenis teks, pemelajar BIPA cenderung adaptif dengan jenis teks yang diberikan. Sementara itu, jenis evaluasi teks yang diberikan lebih mudah dengan menggunakan jenis evaluasi Benar-Salah karena pilihan teks tersebut hanya dua sehingga kemungkinan benar saat menjawab teks lebih besar. Hal itu yang menjadi kebanggaan pemelajar BIPA saat menjawab soal yang ada di dalam materi ajar membaca.

Materi ajar yang diberikan hanya berupa materi ajar membaca karena penulis ingin melihat fokus utamanya kepada tanggapan para siswa BIPA dalam membahas dan mendiskusikan materi ajar tersebut bersama pengajarnya. Hal ini disebabkan oleh anggapan penulis bahwa membaca merupakan gerbang awal pengetahuan saat pemelajar BIPA berkunjung ke Indonesia.

Adapun pengolahan data berdasarkan hasil uji coba di dalam kelas adalah sebagai berikut.

### 1) Unit 1 Perkenalan

**Tabel 1**  
**Daftar Nilai Latihan Unit 1 Perkenalan**

No.	NAMA	NILAI
1	Olga Federova	90
2	Edward Tregubov	90
3	Natalia Rudik	100
4	Julie Ryzhaya	100
5	Polinia Popova	90
6	Alexander Wasilev	90
7	Valeria Nikitina	90

### 2) Unit 2 Aktivitas Sehari-hari

**Tabel 2**  
**Daftar Nilai Latihan Unit 2 Aktivitas Sehari-hari**

No.	NAMA	NILAI
1	Olga Federova	80
2	Edward Tregubov	90
3	Natalia Rudik	100
4	Julie Ryzhaya	100
5	Polinia Popova	90
6	Alexander Wasilev	-
7	Valeria Nikitina	-



### 3) Unit 3 Berbelanja

**Tabel 3**  
**Daftar Nilai Latihan Unit 3 Berbelanja**

No.	NAMA	NILAI
1	Olga Federova	100
2	Edward Tregubov	90
3	Natalia Rudik	100
4	Julie Ryzhaya	100
5	Polinia Popova	-
6	Alexander Wasilev	-
7	Valeria Nikitina	-

### 4) Unit 4 Kependudukan

**Tabel 4**  
**Daftar Nilai Latihan Unit 4 Kependudukan**

No.	NAMA	NILAI
1	Olga Federova	90
2	Edward Tregubov	100
3	Natalia Rudik	100
4	Julie Ryzhaya	90
5	Polinia Popova	-
6	Alexander Wasilev	-
7	Valeria Nikitina	-

### 5) Unit 5 Kesehatan

**Tabel 5**  
**Daftar Nilai Latihan Unit 5 Kesehatan**

No.	NAMA	NILAI
1	Olga Federova	90
2	Edward Tregubov	90
3	Natalia Rudik	100
4	Julie Ryzhaya	100
5	Polinia Popova	90
6	Alexander Wasilev	90
7	Valeria Nikitina	90

### 6) Unit 6 Pelayanan Umum

**Tabel 6**  
**Daftar Nilai Latihan Unit 6 Pelayanan Umum**

No.	NAMA	NILAI
1	Olga Federova	80
2	Edward Tregubov	90
3	Natalia Rudik	90
4	Julie Ryzhaya	90
5	Polinia Popova	-
6	Alexander Wasilev	-



7	Valeria Nikitina	-
---	------------------	---

## 7) Unit 7 Transportasi

**Tabel 7**  
**Daftar Nilai Latihan Unit 7 Transportasi**

No.	NAMA	NILAI
1	Olga Federova	80
2	Edward Tregubov	100
3	Natalia Rudik	100
4	Julie Ryzhaya	100
5	Polinia Popova	80
6	Alexander Wasilev	-
7	Valeria Nikitina	-

## 8) Unit 8 Daerah Wisata

**Tabel 8**  
**Daftar Nilai Latihan Unit 8 Daerah Wisata**

No.	NAMA	NILAI
1	Olga Federova	100
2	Edward Tregubov	100
3	Natalia Rudik	100
4	Julie Ryzhaya	100
5	Polinia Popova	100
6	Alexander Wasilev	-
7	Valeria Nikitina	-

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar membaca ini terlalu mudah untuk kelas ini karena ini merupakan kelas B-2 awal, bukan kelas A-1 atau A-2. Hal ini dilihat dari perolehan nilai rata-rata yang diperoleh siswa BIPA di kelas selama mengerjakan bahan ajar membaca tersebut.

### c. *Outcomes (Output)*

Hasil atau keluaran dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca terkait dengan penyusunan materi ajar BIPA, baik yang terpisah setiap keterampilannya maupun yang integratif. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi materi ajar membaca BIPA yang dapat diterapkan kepada para pemelajar BIPA dengan kemampuan bahasa Indonesia tingkat pemula.

Keluaran penelitian ini berupa materi ajar membaca berdasarkan analisis kebutuhan siswa BIPA yang disesuaikan dengan kurikulum berstandar nasional. Namun, penulis mengembangkannya berdasarkan konteks yang terjadi di dalam kelas sehingga lebih luwes dan fleksibel.

## 2. Pembahasan

Dengan beranalogi pada hasil uji coba instrumen, seperti uji coba materi ajar dan wawancara penulis dengan pengajar BIPA tingkat pemula, berikut ini standardisasi materi ajar membaca tingkat pemula.



#### **a. Wujud Materi Ajar**

Ada beberapa tahapan yang sebaiknya dilakukan ketika menyusun sebuah materi ajar untuk membaca. Setelah mencantumkan topik yang akan kita bahas, kita melanjutkan dengan tahap perkenalan (*introduction*). Biasanya tahap ini berupa pertanyaan yang akan menjembatani ke dalam teks. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyusun teks. Kemudian, tahap berikutnya adalah tahap pemberian latihan. Latihan tersebut harus dikembangkan lagi dalam beberapa latihan, bentuknya berbeda-beda dan harus menarik.

#### **b. Penentuan Topik**

Dalam pengajaran BIPA, kenyamanan pemelajar dalam belajar merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Salah satu strateginya adalah menentukan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan pemelajar. Ketika pemelajar menyukai topik yang diberikan, pembelajaran pun dilaksanakan. Jika pemelajar tidak menyukainya, para pengajar dapat mengubahnya agar mereka dapat menikmati pembelajaran. Jadi, dengan kata lain, topik-topik penting yang diberikan kepada pemelajar BIPA tingkat pemula bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut.

#### **c. Bentuk Teks**

Seluruh bentuk teks yang dibuat atas kreativitas pengajar dapat digunakan sebagai materi ajar, yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhan. Bentuk teks tersebut dapat berupa dialog, wacana, bagan/grafik, jadwal, atau tiket. Namun, teks-teks tersebut sebaiknya bersifat naratif dan deskriptif karena kedua teks ini lebih diperlukan untuk menggambarkan atau menceritakan sesuatu hal yang berhubungan dengan topik.

#### **d. Urutan Materi**

Sama halnya dengan topik, urutan materi pun lebih bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut mempelajari bahasa Indonesia. Jika siswa tersebut mempunyai alasan mempelajari bahasa Indonesia untuk kepentingan komunikasi, berarti materi-materi yang diberikan pun lebih mengarah kepada komunikasi sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, jika ada siswa yang mempelajari bahasa Indonesia untuk keperluan pekerjaan, materi yang diberikannya pun sebaiknya yang lebih mendekati siswa kepada pekerjaannya.

#### **e. Bentuk Soal**

Seluruh bentuk soal yang ada dapat digunakan dalam soal-soal pelatihan BIPA tingkat pemula sesuai dengan kebutuhan. Namun, bentuk soal yang paling lancar dikerjakan lebih mengacu kepada bentuk soal Pilihan Ganda (PG) dan Benar-Salah.

#### **f. Materi**

Berdasarkan hasil uji coba sederhana penulis terhadap kelas di KBRI Moscow, ditemukan bahwa materi-materi yang diberikan terlalu mudah untuk kelas B-2 awal. Hal itu disebabkan siswa kelas tersebut yang pernah mempelajari bahasa Indonesia selama sekitar enam bulan sebelum dimulainya kelas yang sekarang. Berdasarkan hasil perolehan nilai, pemelajar tersebut nilainya rata-rata lebih dari 80. Dengan demikian, materi ajar ini dapat diubah tingkat kesulitannya agar dapat disesuaikan dengan kelas B-2 atau bahan ajar membaca ini dapat digunakan pada kelas A-1.



## PENUTUP

- a. Materi bahasan yang penting untuk teks membaca BIPA tingkat pemula adalah materi-materi bahasan yang biasanya akan mereka temui di dalam kesehariannya. Ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang autentik dan menimbulkan kesan bahwa materi bahasan itu memang sangat dibutuhkan ketika mereka hidup dalam budaya masyarakat Indonesia.
- b. Seluruh bentuk teks yang ada dapat dipakai dalam materi ajar membaca tingkat pemula. Namun, penggunaannya tentu sesuai dengan kebutuhan, seperti dialog, wacana, formulir, dan tiket.
- c. Penentuan urutan materi sebaiknya diawali dari hal-hal yang terdekat dan mudah bagi pembelajar agar mereka merasa nyaman dan tidak terlalu “kaget” dalam mempelajari bahasa Indonesia.
- d. Seluruh bentuk soal pelatihan bisa digunakan untuk mengetahui pemahaman pembelajar terhadap teks yang diberikan seperti benar-salah, pilihan ganda, isian singkat, maupun kalimat rumpang. Namun, selama ini bentuk soal yang paling lancar dikerjakan oleh pembelajar BIPA tingkat pemula adalah bentuk soal Benar-Salah, sedangkan yang paling lama dikerjakan oleh pembelajar adalah bentuk soal isian.

Ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan berkaitan dengan temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, yakni sebagai berikut.

- a. Materi ajar membaca hendaknya diberikan dari tingkat kesulitan mudah ke susah.
- b. Materi ajar membaca lebih mengarah kepada budaya Indonesia, tetapi tetap menasional tidak bersifat kedaerahan.
- c. Seluruh jenis teks dan jenis evaluasi bisa diberikan, tetapi dengan materi yang relevan dan sesuai dengan konteks pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. S., Bistok. (1994). “Beberapa Parameter dalam Pengembangan Bahan Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA): Suatu Kajian Buku-buku Pelajaran BIPA yang Digunakan di Australia, Amerika, dan Eropa”. Dalam KIPBIPA Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Salatiga: Satya Wacana Christian University.
- Basuki, S. (1999). “Pengajaran dan Pemerolehan Bahasa untuk Orang Asing: Berbagai Masalah”. Makalah pada Lokakarya BIPA Regional Bali III, Denpasar, IALF Bali.
- Brinkerhoff, Robert O. et.al. (1983). *Program Evaluation A Practitioner’s Guide For Trainers and Educator*. Boston: Kuwer-Nijhoff Publishing.
- Edison. (2009). Penelitian dan Evaluasi Dalam Bidang Pendidikan: Evaluasi CIPP, [Online], (<http://ed150n5.blogspot.com/2009/04/evaluasicipp.html>, 11 November 2016).
- Fuddin Van B. (2007). Evaluasi Program, [Online], (Tersedia: [http:// fuddin.wordpress.com /2007/07/17/ evaluasi-program/](http://fuddin.wordpress.com/2007/07/17/evaluasi-program/), diakses 11 November 2016)
- McMillan, JH dan Schumacer, S. (2010). *Research In Education : Evidence Based Inquiry*. New Jersey: Pearson Education Inc.



- Muliastuti, Liliana. (2015). Model Materi Ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Berbasis *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR) dan Pendekatan Integratif: Sebuah Studi Pengembangan pada Program BIPA-UNJ. Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Tidak diterbitkan.
- Mulyati, Yeti. (2006). “Mengokohkan Jati Diri Bangsa melalui Program BIPA Berbasis Budaya”. Tersedia: [http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR.\\_PEND.\\_BHS.\\_DAN\\_SASTRA\\_INDONESIA/196008091986012-YETI\\_MULYATI/MAKALAH\\_BIPA.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/196008091986012-YETI_MULYATI/MAKALAH_BIPA.pdf). [5 Mei 2017]
- Purnomo, H. (1994). “Penyusunan Bahan Pembelajaran Membaca dan Kosakata Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing”. Dalam KIPBIPA Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Salatiga: Satya Wacana Christian University.
- Rusli, R. S. (1994). “Kurikulum Beserta Bahan Pengajarannya yang Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat”. Dalam KIPBIPA Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Salatiga: Satya Wacana Christian University.
- Setiadi, R. (2000). “Pengajaran Baca Tulis Permulaan bagi Penutur Asing”. Dalam Prosiding Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) III. Bandung: CV Andira.
- Stake, Robert E. (1967). *The Coutenance of Educational Evaluation*. Teachers College record 68, 523--540.
- Soedarso. (2002). *Speed Reading Sistem Membaca Cepat dan Efektif*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suchman, E. (1967). *Evaluation Roots: Tracing Theorists' Views and Influences*, Edited by Marvin C. Alkin. London: Sage Publications, International Educational and Professional Publisher.
- Sukmadinata, N.S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: UPI.
- Suyata, P. (2000). “Model Alat Ukur Evaluasi BIPA”. Dalam Prosiding Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) III. Bandung: CV Andira.
- Tampubolon, D. P. (1990). *Kemampuan Membaca: Teknik Membaca Efektif dan Efisien*. Bandung: Angkasa.
- Tarigan, H. G. (1985). *Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.
- Tarigan, H. G dan Tarigan, D. (1988). *Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.
- Tayibnaxis, F.Y. (1989). *Evaluasi Program*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Tim BIPA Badan Bahasa. (2012). Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Tersedia: [http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/info\\_bipa](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/info_bipa). [1 Mei 2017]
- Widharyanto, B. (2003). “Dimensi Autentitas dalam Pembelajaran BIPA”. Dalam *Prosiding Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) IV*. Denpasar: IALF Bali.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Mochamad Whilky Rizkyanfi  
Judul Makalah : Studi Evaluatif Bahan Ajar Membaca Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Tingkat Pemula di Moscow, Rusia  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.00  
Moderator : Dony Setiawan, S.S., M.Pd.  
Pencatat : 1. Septimariani  
2. Vita Luthfia Urfa

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Bahasa Indonesia belum populer seperti bahasa-bahasa lainnya. Orang yang berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia makin hari makin bertambah banyak. Pembelajar BIPA pun makin banyak. Peminat bahasa Indonesia di Rusia berjumlah 52 orang. Program BIPA di Moskow tidak dilakukan setiap tahun karena dikhawatirkan peminatnya terlalu banyak, sementara peluang kerjanya sedikit. Di Moskow diperlukan pengajar maksimal sepuluh orang. Bahan ajar yang digunakan di Moskow berbasis teks. Bahan ajar itu diberikan oleh PPSDK. Banyak pembelajar yang berminat terhadap bahasa Indonesia sehingga bahan ajarnya harus disesuaikan dengan jumlah siswa. Jumlah pembelajar BIPA kurang berimbang dengan bahan ajar.
2. Membaca merupakan keterampilan yang sangat penting di antara keterampilan yang lainnya. Membaca adalah gerbang untuk mengetahui seseorang. Melalui bahan bacaan, dapat diperoleh bahan ajar autentik berdasarkan kebutuhan pembelajar. Bahan ajar itu juga dapat memberikan wawasan kebangsaan (kebudayaan, kearifan lokal, dan jati diri Indonesia).
3. Dalam penelitian ini digunakan metode evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Model evaluasi *stale* yang terdiri atas variabel *antecedents* (konteks).
4. Kurikulum BIPA yang digunakan mengacu pada kurikulum dari PPSDK yang dikembangkan. Kurikulum itu disusun dari hal-hal terdekat. Siswa cenderung tidak mengalami kesulitan untuk memahami karena bahan ajar yang digunakan disesuaikan dengan kondisi mereka. Materi yang diberikan berupa teks narasi, dialog, formulir, tiket, dan KTP. Siswa kelas pemula cenderung setara dengan B2 awal. Keluaran hasil pembelajaran dapat memberikan informasi kepada para pembaca dan penyusun bahan ajar BIPA.
5. Wujud materi bahan ajar mencakupi topik, tahap perkenalan, dan penyusunan teks.
6. Penentuan topik diberikan secara fleksibel.
7. Para pengajar BIPA merupakan pegiat diplomasi kebahasaan yang bekerja untuk membina hubungan baik antarbangsa.



## **Tanya Jawab**

### **Penanya 1**

Nama : Dewi Kusumaningsih

Instansi : UPN Sukoharjo

### **Pertanyaan:**

Apa tujuan akhir pembelajaran yang dilakukan hanya beberapa bulan?

### **Jawaban:**

Selama dua bulan dan 18 hari tujuan yang ingin dicapai adalah mengajar siswa untuk dapat berbicara sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mengenalkan budaya Indonesia. Tujuan itu dapat dicapai. Para pembelajar itu datang ke Indonesia dan belajar ke PPSDK.

### **Penanya 2**

Nama : Rosida Ernawati

Instansi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

### **Pertanyaan:**

Apa model materi yang digunakan untuk pembelajar?

### **Jawaban:**

Wujud materi ajar adalah topik, tahap pengenalan dengan gambar/materi singkat, tahap penyusunan teks, dan tahap pemberian latihan untuk menguji pemahaman teks yang sudah dibaca. Pembelajar dapat mengetahui teks dan dapat melakukan pelafalan dengan baik.

### **Penanya 3**

Nama : Deni Karsana

Instansi : Sulteng

### **Pertanyaan:**

Apakah dibutuhkan model pembelajaran tentang ketaatan pelafalan abjad/kata sesuai dengan bahasa Indonesia baku atau tidak? Dari segi hasil, apa yang membedakan pengajaran BIPA di Moskow dan Korea?

### **Jawaban:**

Materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan pemula yang diawali dengan pengenalan dan selanjutnya fokus ke topik lainnya. Setiap topik memiliki pelatihan teks yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman pembelajar.

### **Penanya 4**

Nama : Rian

Instansi : Surabaya

### **Pertanyaan:**

Bagaimana cara menghadapi problem yang berkaitan dengan perbedaan budaya yang dihadapi dalam pembelajaran BIPA?





**Jawaban:**

Perbedaan latar belakang budaya cukup berdampak besar dalam pembelajaran BIPA, apalagi budaya yang bertolak belakang. Berdasarkan pengalaman di KBRI Moskow, para pembelajar dapat menggunakan bahasa Indonesia meskipun penggunaannya tidak lancar. Bahan ajar di Moskow berupa majalah *Tempo*, pengenalan budaya waktu, dan perbedaan waktu azan.

**Penanya 5**

Nama : Reza

Instansi : Pusat Pembinaan

**Pertanyaan:**

Bahan ajar dan materi ajar apa yang diajarkan kepada pembelajar?

**Jawaban:**

Perkenalan secara sederhana cocok untuk pemula dan bahan ajar membaca. Karena karakteristik pembelajar dan kemampuannya berbeda-beda berbeda, bahan ajar yang diberikan fleksibel.

**Penanya 6**

Nama : Prima

Instansi : Universitas Negeri Surabaya

**Pertanyaan:**

Apa saja topik yang diajarkan dalam pembelajaran BIPA? Mengapa mereka mengatakan bahwa bahan ajarnya terlalu mudah?

**Jawaban:**

Ada delapan topik yang diberikan, yaitu perkenalan, aktivitas sehari-hari, berbelanja, kependudukan, kesehatan, pelayanan umum, transportasi, dan daerah wisata. Rata-rata nilai pembelajar di KBRI Moskow untuk setiap topik adalah 90 sehingga disimpulkan bahwa bahan ajar yang diberikan terlalu mudah. Kami menyarankan agar PPSDK membuat bahan ajar untuk level yang lebih tinggi.

**Isu-Isu Penting:**

1. Pengajar BIPA harus dibekali buku bahan ajar prapemula untuk pembelajar di Kamboja dan Moskow agar proses pembelajaran dapat dipermudah. Perkenalan untuk pembelajar dimulai dengan cara yang sederhana.
2. Pengajar BIPA diberi kurikulum pembelajaran dari PPSDK yang dapat dikembangkan. Kurikulum itu disusun dari hal-hal terdekat. Bahan ajar disesuaikan dengan kondisi dan materi yang diberikan berupa teks narasi, dialog, formulir, tiket, dan KTP. Keluaran hasil pembelajaran dapat memberikan informasi kepada para pembaca dan penyusun bahan ajar BIPA.



## 8. Diplomasi dan Strategi Bahasa dan Sastra: Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pergaulan Internasional

### DIPLOMASI DAN STRATEGI BAHASA DAN SASTRA: BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PERGAULAN INTERNASIONAL

*Diplomasi and Strategy of Language and Literature: Bahasa Indonesia As A Language of International Communication*

**Kishor Kumar Das**

Head, Bahasa Indonesia Section  
External Services Division, All India Radio  
New Delhi-110001 (India)  
kkdas972@gmail.com

#### **Abstrak**

Bahasa Indonesia, sebagai bahasa baru, muncul sebagai alat politik untuk menyatukan pemuda Indonesia untuk mencapai kemerdekaan negara. Dalam perjalanan singkatnya, bahasa ini telah mencapai dimensi global dan memiliki potensi untuk menjadi bahasa interaksi global, setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Dalam makalah ini dibahas berbagai aspek bahasa sebagai sarana komunikasi, diplomasi, dan kekuatan lunak (*soft power*) dalam proses mendorong kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional. Pembentukan Masyarakat Ekonomi Asia dianggap menjadi salah satu kesempatan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan dampak diplomasi bahasa. Selain itu, dalam makalah ini juga akan dibahas tentang diplomasi bahasa dan sastra, yang berkaitan dengan permasalahan dan strateginya guna mendorong bahasa Indonesia, baik dari sudut pandang internal maupun eksternal, terutama melalui pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing (BIPA). Kesimpulan dari analisis ini adalah bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari literatur etnik dan nilai-nilai budayanya sebagai alat diplomasi budaya. Kebangkitan perdagangan dan ekonomi di Indonesia dan kawasan Asia membuat bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa internasional.

**Kata-kata kunci:** diplomasi bahasa, diplomasi budaya, komunikasi, BIPA, sastra

#### **Abstract**

*Bahasa Indonesia emerged recently as a political tool to unite Indonesian youth to achieve country's independence. In its short journey, this language has achieved global dimension and has the potential to become a language of global interaction, at least in the region of Southeast Asia. This paper discusses various aspects of language as means of communication, diplomacy, soft power in the process of pursuing foreign policy to achieve national interest. Formation of Asian Economic Community is considered to be an important opportunity for Indonesia to increase the impact of language diplomacy. This article portrays and focusses on language and literature diplomacy, in terms of an issue, strategy and foster bahasa Indonesia internal as well as external point of view, especially through the learning of bahasa Indonesia for foreigners (BIPA). The conclusion of the analysis shows that bahasa Indonesia, is not only inseparable from its ethnic literature and cultural values as a tool of Indonesian cultural diplomacy, but also,*



*in view of the rise of trade and economy in the region has the potential to become international language.*

**Keywords:** *language diplomacy, cultural diplomacy, communication, BIPA, literature,*

## **PENDAHULUAN**

Posisi geopolitik Indonesia di masyarakat internasional menjadi makin penting. Di bidang ekonomi, Indonesia berada pada posisi ekonomi terbesar ke-16 di dunia dan merupakan anggota kelompok negara-negara G-20. Indonesia diproyeksi akan menduduki tempat ke-7 dari segi ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Peranan dan perkembangan positif di bidang-bidang, antara lain, sosioekonomi, politik, dan budaya, termasuk bahasa akan sangatlah membantu Indonesia mencapai kedudukan tersebut. Sejak Peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia menjadi bahasa kesatuan dan dicantumkan sebagai bahasa negara dalam Pasal 36 UUD 1945. Setelah itu, bahasa Indonesia mengalami perkembangan pesat. Sejarah menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, khususnya daerah Riau, yang pada waktu itu merupakan salah satu bahasa daerah di wilayah Sumatra. Bahasa Melayu dari daerah Riau dijadikan sebagai bahasa Indonesia oleh para pemuda saat Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda di Solo. Bahasa Indonesia pada waktu itu lebih bersifat politik daripada linguisitik. Tujuan utamanya adalah mempersatukan kaum pemuda demi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Istilah bahasa Indonesia dianggap bisa memberikan inspirasi dan semangat nasionalisme dalam perjuangan kemerdekaan, sedangkan bahasa Melayu dianggap bersifat kedaerahan. Ikrar yang setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia juga mencerminkan betapa pentingnya bahasa bagi suatu bangsa. Bahasa sebagai alat komunikasi mutlak dan efektif diperlukan oleh setiap bangsa. Bangsa mana pun tidak dapat berkembang tanpa bahasa. Bahasa dapat menggambarkan dan menunjukkan diri bangsa secara utuh dalam interaksi internasional dengan bangsa lain. Jadi, bahasa menunjukkan identitas bangsa atau identitas nasional. Sebagai bagian kebudayaan, bahasa menunjukkan betapa tinggi dan rendahnya kebudayaan bangsa. Ikrar Sumpah Pemuda inilah yang menjadi dasar yang kukuh bagi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Dalam perjalanan selanjutnya, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa persatuan, tetapi berkembang sebagai bahasa negara, bahasa resmi, bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta saat ini sudah berpotensi berkembang sebagai bahasa internasional.

Mahsun (2013) menyatakan ada sekitar 91 ribu kosakata dan 240 ribu istilah. Hal itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Potensi kebahasaan tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, untuk memajukan bahasa Indonesia, pengembangannya dapat ditunjang oleh bahasa daerah yang berjumlah sekitar 594. Potensi bahasa daerah yang sangat banyak dapat menjadi sumber utama pengembangan bahasa Indonesia untuk memperkaya khazanah kosakata dan peristilahan dalam perkembangannya, selain sumber-sumber dari bahasa asing jika dibutuhkan.

Pada tahun 2009, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa asing kedua oleh pemerintah daerah di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Pada tahun 2012, menurut



Kementerian Luar Negeri, penutur bahasa Indonesia sebanyak 4.463.950 orang sebagai penutur asli terbesar kelima di dunia yang tersebar di luar negeri. Pada tahun 2011 Ketua DPR RI, dalam sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-32, mengusulkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa kerja dalam sidang-sidang AIPA. Sesuai dengan kemajuan yang tercapai oleh bangsa Indonesia di era global, peran Indonesia dalam interaksi internasional juga telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dipandang sangat penting oleh masyarakat internasional (*Kompas*, 2013).

Bahasa Indonesia telah dipelajari di lebih dari 45 negara dengan jumlah lembaga tidak kurang dari 130 yang terdiri atas perguruan tinggi, pusat-pusat kebudayaan asing, KBRI, dan lembaga-lembaga khusus (*Kompas*, 2013). Bahasa Indonesia telah diresmikan oleh pemerintah daerah Vietnam sebagai bahasa yang diprioritaskan, selain bahasa Prancis, Jepang, dan Inggris. Hal itu membuat posisi Indonesia menjadi makin penting di dunia. Oleh karena itu, banyak orang dari luar negeri tertarik dan ingin mempelajari bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi perdagangan, pariwisata, politik, pendidikan, seni, dan budaya. Australia merupakan negara yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran yang diajarkan pada lebih dari 500 sekolah, bahkan Australia menempatkan bahasa Indonesia pada peringkat keempat sebagai bahasa terpopuler.

Di Indonesia sendiri, lebih dari 45 lembaga yang telah mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing, baik di perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga khusus lainnya di bawah skema BIPA. Badan Bahasa menyadari bahwa Pengajaran BIPA mempunyai peran sangat penting dan strategis untuk memperkenalkan Indonesia kepada komunitas internasional. Oleh karena itu, pengajaran BIPA adalah salah satu cara yang tepat untuk menyebarkan bahasa Indonesia, termasuk memperkenalkan budaya dan masyarakat Indonesia kepada dunia luar secara lebih komprehensif. Media ikut membantu menyebarkan berbagai informasi tentang masyarakat dan budaya Indonesia. Pengajaran BIPA dapat memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan diplomasi budaya di komunitas internasional. Pemahaman komprehensif tentang budaya dan masyarakat Indonesia juga dapat meningkatkan saling pengertian dan saling hormat yang akan membantu meningkatkan kemitraan dan kerja sama internasional. Untuk itu, perlu dilihat pengajaran BIPA sebagai bagian dari strategi untuk diplomasi budaya.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa terbesar di Asia Tenggara. Hal tersebut ditinjau dari segi penuturnya yang berjumlah lebih dari 225 juta orang. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang besar dengan 17.504 pulau besar dan kecil. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dengan posisi geografis yang sangat strategis sehingga menjadi negara penting dalam hal ekonomi, politik, perdagangan, pendidikan, dan budaya bagi negara-negara lain, terutama di kawasan ASEAN. Pada bulan Desember 2015 diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan komitmen ASEAN untuk membangun dan mencapai kemakmuran bersama dengan slogan *One Vision, One identity, dan One Commitment*. Kondisi tersebut akan mendorong terbentuknya pasar tunggal yang memudahkan negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran barang dan jasa, termasuk tenaga kerja profesional, seperti dokter, perawat, pengajar, dan pengacara. Oleh sebab itu,



berbagai persiapan harus dilakukan oleh negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, untuk menyambutnya agar jangan sampai ketinggalan. Banyak wacana yang menjadi fokus perhatian bangsa Indonesia untuk menghadapi MEA, terutama dalam bidang politik dan ekonomi.

Perkembangan internasional dan pasar bebas telah meningkatkan jumlah orang asing yang bekerja dan belajar di Indonesia. Untuk dapat bertahan di Indonesia, mereka perlu mempelajari bahasa tempat mereka bekerja. Pengajaran Bahasa Indonesia yang diberikan kepada orang asing dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu tingkat kelas pemula, menengah, dan lanjut serta mencakup empat kemampuan kebahasaan, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Penguasaan bahasa Indonesia berkaitan erat dengan kesempatan untuk mengambil faedah-faedah ekonomi di zaman perdagangan bebas di Masyarakat Ekonomi Asia. Indonesia termasuk negara berkekuatan ekonomi cukup besar di kawasan ASEAN sehingga mempunyai pengaruh besar dari sudut pandang ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa penting yang dapat membantu menyukseskan perdagangan di kawasan tersebut. Menurut Mahsun (2013), salah satu fungsi Badan Bahasa ialah menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Fungsi itu tentu terkait dengan ikhtiar untuk mengajarkan bahasa Indonesia pada penutur asing. Saat ini ada 45 negara dan 174 lembaga penyelenggara BIPA yang tersebar di seluruh dunia dan paling banyak terdapat di Australia.

Orang-orang warga asing, khususnya mahasiswa, sangat antusias untuk mempelajari bahasa Indonesia. Ketua Program Darmasiswa Republik Indonesia, Pangesti Wiedarti, mengatakan, Bahasa Indonesia menjadi jurusan favorit para peserta. Hasil survei pada tahun 2012 ialah sebanyak 65% ingin mempelajari bahasa Indonesia; 30% ingin mempelajari seni-budaya, 3% ingin mempelajari kuliner dan pariwisata, dan 2% ingin mempelajari hal lain. Program Darmasiswa tersebut adalah program beasiswa bagi mahasiswa asing yang negaranya memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia. BIPA dipelajari oleh semua mahasiswa Darmasiswa RI yang belajar di 46 hingga 59 universitas di Indonesia. Setiap tahun ada sekitar 700 mahasiswa asing dari 77 negara yang belajar seni, budaya, dan bahasa Indonesia, juga bidang-bidang lainnya (*Kompas*, 2013).

Rivai (2012) berpendapat bahwa bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang lebih pesat di antara bahasa-bahasa lainnya di seluruh dunia. Pengajaran BIPA meningkat cukup pesat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Makin meningkatnya perkembangan hubungan Indonesia dengan negara lain dalam bidang pendidikan, budaya, dan pariwisata menyebabkan bahasa Indonesia makin menjadi populer. Dengan demikian, makin besar kebutuhan yang dirasakan akan perlunya orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia. Kebutuhan untuk pengajaran BIPA dianggap penting untuk perencanaan perkembangan bahasa Indonesia. Pada Kongres Bahasa Indonesia ke VI tahun 1993 tercatat bahwa pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, dan Korea, memperlihatkan adanya keberagaman dalam motivasi sosial dan politik, terlihat dalam keterlibatan pemerintah, lembaga swasta, dan universitas dalam kerja sama internasional.

Pada awalnya pengajaran bahasa Indonesia hanya ditunjukkan sebagai alat keterampilan dan ilmu. Bahasa Indonesia disebutkan sebagai jurusan untuk



memperoleh gelar di tingkat perguruan tinggi. Perkembangan bahasa Indonesia mampu menjadikan fungsinya sebagai bahasa komunikasi modern dalam kegiatan internasional (Adryansyah, 2012). Berkaitan dengan itu, Badan Bahasa sebagai lembaga pemerintah yang diberi mandat untuk menangani masalah bahasa di Indonesia, bertanggung jawab untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa Indonesia, serta memfasilitasi lembaga lain dalam hal pengajaran bahasa Indonesia. Dalam hal ini, pengajaran BIPA di dalam negeri atau pun di luar negeri terus tumbuh dan berkembang sehingga pada akhirnya bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi dalam wacana ekonomi, budaya, dan sosial secara internasional.

Sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia di arena global, peran Indonesia dalam wacana internasional menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di kancah internasional. Dengan demikian, hal itu meningkatkan minat orang-orang asing untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi untuk mencapai berbagai tujuan, baik ekonomi, politik, seni, budaya, pendidikan, maupun pariwisata. Dengan makin meningkatnya persahabatan, kemitraan, dan kerja sama internasional, pengajaran BIPA juga dapat memiliki peran sebagai sarana untuk melakukan diplomasi Indonesia dengan sukses di masyarakat internasional. Dengan demikian, pengajaran BIPA pada kenyataannya dianggap sebagai bagian dari strategi diplomasi. Strategi diplomasi melalui pengajaran bahasa kepada orang asing juga diadopsi oleh berbagai negara lain, seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang (Kemdikbud, 2014).

Selain di India, bahasa Indonesia sekarang ini sudah dipelajari di 45 negara, antara lain, di Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura, Korea, dan negara-negara kawasan Eropa Barat (Efrizal, 2000: 58). Orang-orang yang berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia makin meningkat. Ada berbagai tujuan dan kepentingan yang melatarbelakangi orang asing mempelajari bahasa Indonesia. Mereka mempelajari bahasa Indonesia untuk memperoleh kesempatan sekaligus kelancaran bekerja di Indonesia, untuk kelancaran perjalanan wisata, dan termasuk dalam rangka kerja sama pada bidang tertentu. Keadaan ini tidak terlepas dari keberadaan Indonesia dalam kancah internasional. Negara-negara lain merasa berkepentingan untuk menjalin hubungan ekonomi dan politik serta kerja sama dalam banyak hal dengan Indonesia. Salah satu faktor penunjang tercapainya hubungan dan kerja sama tersebut adalah dengan penguasaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, mereka berusaha untuk dapat menguasai bahasa Indonesia. Jadi, sewajarnya timbullah pertanyaan apakah bahasa Indonesia dapat menjadi media untuk pergaulan internasional?

Setelah dikemukakan berbagai permasalahan di atas, rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana proses strategi dan diplomasi bahasa Indonesia sehingga berpotensi menjadikannya sebagai bahasa pergaulan internasional? Selain itu, strategi apa yang harus dilakukan untuk memberikan penguatan terhadap bahasa Indonesia agar dapat menjadi bahasa pergaulan Internasional?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menganalisis situasi objek serta masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif



kualitatif. Penulis berharap, dengan menggunakan metode deskriptif dapat dicapai tujuan penelitian, yaitu penyajian secara tepat tentang fakta-fakta dan ciri objek yang dianalisis. Dalam proses penelitian, data dikumpulkan dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan dianalisis, yang meliputi berbagai buku yang berhubungan dengan teori komunikasi, bahasa, budaya, dan sastra Indonesia; buku yang berkaitan dengan diplomasi publik, khususnya diplomasi budaya; serta berbagai laman di internet, surat kabar, dan laporan yang berhubungan dengan permasalahan akan diteliti oleh penulis yang dianggap dapat diandalkan, seperti berita tentang BIPA di surat kabar dan hasil wawancara.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Komunikasi**

Komunikasi dalam diplomasi seperti darah dalam tubuh manusia. Kapan pun komunikasi berhenti, tubuh politik internasional yang menjalankan proses diplomasi mati dan hasilnya adalah konflik atau atrofi kekerasan (Tran, 1987: 8). Para pengamat dan praktisi sama-sama memberikan kesaksian tentang peran penting komunikasi dalam diplomasi. Bahkan, diplomasi sering didefinisikan dalam komunikasi sebagai ‘suatu proses komunikasi yang diatur’ (Constantinou, 1996: 25) atau ‘sistem komunikasi masyarakat internasional’ (James, 1980: 942). Representasi simbolik diplomasi juga cenderung menonjolkan aspek komunikatifnya.

Hubungan diplomasi dengan komunikasi berjalan jauh di belakang sejarah. Kadang-kadang dikatakan bahwa diplomat pertama adalah malaikat, pembawa pesan antara dewa dan manusia (Nicolson, 1963: 5—6). Bahkan, jika gagasan ini dapat dihentikan sebagai “mitos diplomasi” (Der Derian, 1987: 44—67), kita harus ingat, dalam dua bahasa klasik, Ibrani dan Yunani, kata-kata untuk utusan (*mal'ach* dalam bahasa Ibrani dan *angelos* dalam bahasa Yunani) menyampaikan gagasan kesucian serta misi sekuler (Eban, 1983: 333). Pada masa Yunani kuno, Hermes utusan ilahi adalah dewa bahasa dan diplomasi. Utusan diplomatik yang paling menonjol, Bentara, dianggap sebagai keturunan dari Hermes. Kesucian utusan diplomatik pada masa kuno menyiratkan tidak dapat diganggu gugat dan dengan demikian membayangi pengertian yang lebih baru tentang kekebalan diplomatik (Frey and Frey, 1999: 11; Eban, 1983: 333).

### **2. Bahasa Nasional**

Dalam proses pelaksanaan politik luar negeri, penyebaran bahasa nasional dapat melayani beberapa tujuan praktis. Berkaitan dengan itu, pengetahuan tentang bahasa negara asing membuat ide dan informasi yang disebarkan oleh negara asing itu lebih mudah diakses oleh orang-orang dari negara lain. Di samping itu, penyebaran bahasa nasional dapat memainkan peran penting dalam pelaksanaan kepentingan politik luar negeri di bidang lain, khususnya di bidang ekonomi. Lauk (2002) berpendapat bahwa perusahaan mengajarkan bisnis dengan mudah di pasar negara-negara asing tempat bahasa dari negara asal mereka digunakan secara luas. Sebagai contoh, Cina juga secara aktif mempromosikan pengajaran bahasa nasionalnya di negara-negara asing pada beberapa tahun terakhir dalam kegiatan budaya diplomatiknya. Sementara itu, di Prancis promosi bahasa bahkan dapat dianggap sebagai bagian politik luar negeri. Penyebaran bahasa Prancis secara tradisional dianggap sebagai cara terbaik untuk



menyebarkan budaya nasional dan dengan demikian pengaruh politik Prancis di negara-negara asing meningkat. Dengan kata lain, sebagai ahli politik luar negeri Prancis, Gura (2006) dengan tepat berpendapat bahwa Prancis melihat bahasanya sebagai “vektor pengaruh dan prestise di dunia”.

### **3. Bahasa dan Kekuatan Lunak (*Soft Power*)**

Bahasa apabila ditambah dengan pemahaman akan menjadi kekuatan lunak atau *soft power*. Bahasa adalah *sine qua non* untuk komunikasi, tetapi kata-kata, simbol, atau gerakan fisik tidak berarti tanpa tingkat pemahaman umum di antara para mitra dalam komunikasi, dalam bahasa apa mereka mengekspresikan diri (Cowan *et al*, 2000). Oleh karena itu, perkembangan internet saat ini terjadi pada tingkat yang lebih cepat daripada peningkatan pemahaman tentang negara asing dan sistem pemikiran yang dapat dihubungkan. Itu meningkatkan potensi komunikasi asimetris ketika mereka memiliki pemahaman yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kekuatan lunak (*soft power*).

### **4. Diplomasi**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang kuat terus meningkatkan fasilitas bagi orang-orang di seluruh dunia untuk berhubungan dan berinteraksi langsung dengan satu aspirasi dan membentuk kebijakan publik di berbagai bidang. Seiring dengan pertumbuhan media sosial di seluruh dunia yang eksponensial, banyak pejabat pemerintah, termasuk diplomat, telah memanfaatkan saluran ini untuk melakukan dan memperluas diplomasi publik mereka. Sementara itu, masalah keamanan dan politik masih dianggap sensitif dan cenderung ditangani dengan cara yang lebih tradisional. Banyak kementerian luar negeri memperluas upaya diplomasi publik mereka dengan berfokus pada pertukaran sosial, ekonomi, dan budaya yang dilakukan secara agresif melalui platform ini. Media sosial berfungsi sebagai salah satu katalis yang mempercepat perubahan yang diinginkan di lapangan. Tentu saja, media sosial saja tidak dapat menyebabkan revolusi atau gerakan sosial, tetapi telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi dan budaya adalah media sosial yang sangat cocok.

Tentunya, Indonesia merupakan bagian dari 20 negara teratas dengan jumlah pengguna internet terbanyak dengan populasi internet sebesar 55.000.000 orang. Dari daftar yang sama, satu-satunya negara anggota ASEAN yang masuk 20 besar adalah Filipina, dengan sekitar 33,6 juta pengguna internet aktif (Pohan, 2016). Pada masa mendatang, pertumbuhan penggunaan internet paling tinggi ialah di negara-negara berkembang. Peningkatan besar dalam jumlah hanya dapat terjadi di negara-negara yang padat penduduk dengan koneksi internet yang cepat.

### **5. Diplomasi Bahasa**

Bahasa dalam diplomasi adalah istilah yang jelas dapat ditafsirkan dalam beberapa cara. Dalam pengertian ini kita dapat mengatakan, misalnya bahasa Prancis, digunakan sebagai bahasa diplomatik dominan pada pertengahan pertama abad ke-20. Kemudian, sebagai cara khusus untuk mengungkapkan kebutuhan halus dari profesi diplomatik dengan cara ini dapat dikatakan, misalnya bahwa delegasi dari negara yang demikian itu berbicara tentang subjek yang diberikan dalam bahasa yang sepenuhnya nondiplomatik. Istilah itu dapat merujuk pada





bentuk, gaya, cara atau ekspresi tertentu seperti menteri merumuskan kondisinya dalam bahasa yang luar biasa kuat. Ini bisa juga berarti ekspresi pikiran atau perasaan secara verbal atau nonverbal, seperti mengirim senjata adalah bahasa yang dimengerti setiap orang.

Semua makna ini dan mungkin beberapa makna lainnya, dapat diaplikasikan, baik dalam praktik lisan maupun tulis. Dengan demikian, penggunaan bahasa dalam diplomasi sangatlah penting karena bahasa bukan hanya alat sederhana, sarana untuk mentransmisikan pikiran, atau instrumen komunikasi, melainkan juga menjadi inti dari panggilan diplomatik. Diplomasi adalah upaya negara untuk mendapatkan kepentingan nasional dalam komunitas internasional (Holsti, 1978). Selanjutnya, budaya didefinisikan sebagai semua hasil manusia untuk mengadopsi lingkungannya (Bekker, 1984). Diplomasi adalah alat politik luar negeri untuk memenuhi kepentingan nasional. Setiap negara memiliki strategi sendiri dalam diplomasi. Diplomasi budaya adalah salah satu strategi dalam politik luar negeri dan dapat menjadi alat yang efektif bagi beberapa negara untuk memenuhi kepentingan mereka (Roy, 1995).

Diplomasi budaya didefinisikan sebagai upaya negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, seperti pendidikan, sains, olahraga, dan seni, melalui sarana budaya dan dilakukan oleh aktor negara dan non-negara. Keterlibatan semua elemen negara dalam diplomasi disebut diplomasi total (Jemadu, 2014). Artinya, dalam diplomasi budaya keterlibatan semua elemen Indonesia juga penting. Diplomasi budaya menunjukkan tingkat peradaban suatu negara yang dapat dipelajari oleh negara lain. Dalam konteks yang lebih luas, diplomasi budaya juga berhubungan dengan kekuatan lunak (*soft power*) yang merupakan kemampuan untuk memengaruhi negara lain, tetapi bukan dengan kekuatan militer atau ekonomi. Dalam konteks ini, budaya adalah sumber kekuatan lunak yang penting (Mellisen, 2005). Dengan demikian, pendekatan budaya dapat membuat hubungan antarnegara menjadi lebih terbuka dan nonkonflik.

## **6. Budaya dan Identitas Bangsa**

Identitas bangsa atau identitas nasional mempunyai hubungan erat dengan diplomasi budaya. Diplomasi budaya mengandung nilai yang dimiliki negara sebagai prinsip identitas nasional. Budaya yang digunakan untuk mempromosikan dan memperkenalkan nilai khas negara yang bersangkutan. Budaya secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi pola pikir dan perspektif negara lain. Diplomasi budaya adalah konsep baru dalam hubungan internasional. Pada tahun 2010 angklung diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia (Marantika, 2017). Pemerintah Indonesia mencoba untuk mempromosikan angklung di setiap acara internasional sehingga negara lain tahu bahwa ada negara yang bernama Indonesia yang memiliki budaya yang unik sehingga hal itu dapat menjadi salah satu penjenamaan bagi Indonesia. Angklung yang dikenal luas akan membuat Indonesia memiliki daya tawar yang lebih tinggi terhadap negara lain dan membuat orang lain menebak seperti apa Indonesia sebagai suatu negara.

Pembelajaran bahasa asing juga merupakan bagian penting dari inisiatif diplomasi budaya dan juga merupakan sarana penting bagi negara-negara untuk melindungi keamanan nasional mereka. Upaya diplomatik Amerika Serikat dengan beberapa negara Timur Tengah, misalnya, sering terhambat oleh kurangnya kesadaran budaya dan kurang memadainya kemampuan berkomunikasi



dalam bahasa para pemimpin negara-negara lain. Diplomasi paling baik digambarkan sebagai pertukaran ide, seni, dan aspek-aspek lain dari budaya di antara bangsa-bangsa dan masyarakatnya untuk menumbuhkan saling pengertian (Cummings, 2003). Diplomasi budaya mencakup pertukaran antara orang-orang di berbagai Negara tempat individu dapat mengunjungi negara-negara asing dan belajar tentang budaya dan masyarakat negara asing tersebut. Termasuk di dalamnya ialah mempelajari bahasa, tradisi, dan gaya hidup negara lain. Budaya adalah istilah yang sangat luas sehingga memberikan kontribusi pada berbagai bidang yang termasuk dalam definisi diplomasi budaya, misalnya sastra, seni, kebiasaan tradisi, perilaku manusia, sejarah, musik, cerita rakyat, gerak tubuh, dan hubungan sosial (Sztefka, 2008). Dengan demikian, setiap interaksi atau pertukaran antara orang-orang dari dua negara di salah satu bidang tersebut dianggap sebagai diplomasi budaya, seperti halnya studi tentang bidang-bidang ini karena mereka ada di negara asing.

Diplomasi budaya pada dasarnya adalah mobilisasi apa yang disebut oleh Josef Nye sebagai kekuatan lunak (*soft power*) (Ross, 2002). Kekuatan lunak yang dimaksud berstandar pada kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain (Nye, 2004). Nye (2004) mengatakan bahwa kekuatan lunak suatu negara terletak terutama pada tiga sumber, yaitu budayanya, nilai-nilai politiknya, dan politik luar negerinya. Dengan meningkatkan koneksi pribadi antara orang-orang dari berbagai negara, diplomasi budaya memungkinkan suatu negara untuk membuat cita-cita politiknya dan kebijakannya lebih menarik di mata khalayak asing. Budaya suatu negara yang mencakup nilai-nilai universal memungkinkan pemerolehan hasil yang diinginkan karena hubungan tarik dan tugas yang diciptakannya.

Pada dasarnya diplomasi budaya adalah proses komunikasi dua arah yang melibatkan upaya untuk mempromosikan citra dan nilai-nilai bangsa kepada bangsa lain serta mencoba untuk memahami budaya, nilai-nilai, dan citra negara-negara lain dan orang-orangnya. Diplomasi budaya adalah sarana bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan rasa hormat dan pengertian tentang diri mereka di antara negara-negara lain di dunia. Gifford Malone, seorang mantan Asisten Deputi dan Direktur Asosiasi Pusat Informasi Amerika Serikat sekaligus penulis terkenal mengenai diplomasi AS dan politik luar negeri, dengan tepat menyatakan, “Jika kita berusaha untuk menjadi sukses dalam upaya untuk menciptakan pemahaman bagi masyarakat tentang kebijakan kita, pertama-tama kita harus memahami motif, budaya, sejarah, dan psikologi lawan komunikasi kita dan tentu saja kita juga harus memahami bahasa mereka (Wyszomirski, 2003).”

Diplomasi budaya adalah bagian integral dari kegiatan diplomatik dari hampir semua negara pada masa kini. Dimensi diplomasi khusus ini walaupun makin penting dalam beberapa dasawarsa terakhir, tetapi masih dapat dianggap sebagai bidang kegiatan diplomatik negara yang paling diremehkan, khususnya jika dibandingkan dengan diplomasi ekonomi atau pertahanan. Dalam praktiknya, sikap meremehkan diplomasi budaya sering muncul akibat ide-ide yang tidak jelas dan salah tentang ruang lingkup kegiatannya. Diplomat sering menghindari pengorganisasian dan pelaksanaan acara-acara kebudayaan yang padahal sebenarnya hanya sebagian kecil dari kegiatan diplomasi budaya. Awal dari diplomasi budaya sebagai instrumen khusus politik luar negeri dapat dikaitkan



dengan upaya pertama negara untuk menerapkan gagasan penggunaan budaya yang bertujuan untuk kepentingan mempromosikan tujuan politik luar negeri.

Gagasan diplomasi budaya modern cenderung dikaitkan dengan pembentukan lembaga budaya diplomatik khusus pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Lembaga yang pertama kali muncul bernama Alliance Francaise yang didirikan atas prakarsa seorang diplomat Prancis di Paris pada tahun 1883. Kemudian, setahun kemudian dibuka cabang asing pertama, secara resmi disebut komite lokal, di Barcelona, Spanyol (Pancraccio, 2007). Perlu ditambahkan bahwa Alliance Francaise, yang kegiatannya telah difokuskan terutama untuk mendukung promosi bahasa Prancis di luar negeri, secara hukum merupakan organisasi nonpemerintah dan bukan badan diplomatik Negara. Meskipun demikian, dalam menjalankan kegiatannya lembaga tersebut berkoordinasi dengan dan/atau disponsori oleh Kementerian Luar Negeri Prancis. Sementara itu, pemerintah Cina mempromosikan bahasa dan budayanya di Afrika melalui Confucius Institute. Diorganisasikan oleh sebuah universitas lokal, institut tersebut adalah lembaga nirlaba yang didanai oleh pemerintah Cina yang bertujuan mempromosikan bahasa dan budaya Cina kepada khalayak asing (Wheeler, 2014).

## **7. Budaya: Alat Diplomasi Publik Indonesia**

Diplomasi publik adalah upaya untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pengaruh kepada masyarakat luar dalam rangka mempromosikan kepentingan nasional dan memperluas dialog dengan relasi di luar negeri. Selanjutnya, dikembangkan suatu mekanisme hubungan pemerintah ke masyarakat untuk melakukan aktivitas diplomasi publik agar masyarakat internasional mempunyai persepsi baik tentang negara sebagai landasan sosial bagi pencapaian kepentingan yang lebih luas. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan program BIPA di sini dipahami sebagai aktivitas diplomasi publik yang menunjukkan peran yang sangat signifikan untuk menunjang hubungan baik antara Indonesia dan dunia internasional. Dalam proses pelaksanaan program BIPA, tidak hanya pemerintah yang berperan sebagai penunjang kegiatan diplomasi publik, tetapi juga publik yang menjadikan kegiatan diplomatik publik menjadi lebih efektif. Budaya dapat berperan dalam diplomasi publik karena budaya adalah faktor penting yang dapat digunakan untuk membangun citra dan juga menjadi strategi dalam diplomasi publik dan juga hubungan *people to people* (Yahya, 2018).

Dalam diplomasi publik, budaya memiliki dua peran, yakni membangun citra dan menjalin hubungan *people to people*. Di samping itu, budaya juga menjadi alat pendukung diplomasi, terutama untuk menarik perhatian asing membangun citra positif bagi Indonesia di mata internasional. Berkaitan dengan itu, budaya terlihat lebih lunak dan tidak terkesan politis. Budaya memang memiliki peran penting dalam menjalankan aktivitas diplomasi publik. Dalam hal ini, diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia melalui pelaksanaan program BIPA di Indonesia. Dua hal penting yang dapat diperankan oleh budaya dalam hal ini adalah untuk membangun citra positif Indonesia dan membuat instrumen hubungan antara penutur asing dan pihak yang bertugas dalam menjalankan program BIPA. Budaya juga dipandang sebagai alat yang tepat untuk menjalankan misi diplomatis karena sifatnya yang lunak dan tidak terkesan



politis. Di samping itu, keterlibatan berbagai aktor dalam pelaksanaan program BIPA ini dapat membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan wakil-wakil pemerintah. Dalam konteks ini, mempelajari bahasa Indonesia sebagai posisi tawar budaya menduduki area penting yang dimuat dan disusun sebagai salah satu dimensi yang harus dipelajari oleh penutur asing. Dengan demikian, pihak asing dapat mempelajari karakter budaya Indonesia yang kemudian dapat dipahami sebagai proses pembelajaran terhadap salah satu aktivitas diplomasi publik Indonesia.

Adanya pelaksanaan program BIPA di Indonesia, penutur asing akan memiliki pandangan tersendiri yang akan mereka sampaikan kepada publik di negaranya setelah lulus dari program BIPA di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa budaya Indonesia yang beragam dengan julukan Bhinneka Tunggal Ika menjadikan memahami keberagaman dan keunikan yang luar biasa. Baginya keberagaman agama, budaya, etnis yang ada di Indonesia menjadikannya lebih membuka pikiran dan berpandangan bahwa Indonesia memang memiliki kekayaan yang begitu beragam. Ia sebelumnya tidak percaya dengan keberagaman yang ada di Indonesia, tetapi setelah mengikuti BIPA di Indonesia. Pandangannya berubah dan ia meyakini bahwa Indonesia memang negara yang kaya akan budaya yang menjadikan Indonesia terkenal di mata dunia internasional. Pemahaman mengenai kerja sama internasional, keberagaman budaya, dan variasi agama menjadikannya meyakini bahwa Indonesia mendapatkan julukan kebinekaan harmoni. Dengan demikian, bahasa Indonesia merupakan fungsi budaya Indonesia yang seterusnya juga merupakan fungsi diplomasi publik Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia merupakan fungsi diplomasi publik Indonesia.

## **8. Strategi Diplomasi Bahasa Indonesia**

Diskusi dan pengamatan tentang Prancis, Jerman, Jepang, dan Cina menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, diplomasi budaya dan bahasa adalah bagian dari kebijakan atau politik luar negeri sehingga harus memperoleh dukungan penuh dari pemerintah. Dalam hal ini, sangat penting menunjukkan posisi diplomasi bahasa di antara bidang diplomasi lainnya. Kedua, selain mendirikan kantor perwakilan, lembaga budaya juga menjalin kerja sama dengan universitas dan sekolah yang memiliki program dalam pembelajaran bahasa mereka. Ketiga, bahasa adalah instrumen utama untuk mempromosikan budaya dan mengembangkan citra positif tentang negara. Keempat, setiap negara memiliki persamaan dan poin yang berbeda. Kesamaan itu terkait dengan program pembelajaran bahasa untuk mempromosikan kerja sama budaya dan mengembangkan citra positif. Sementara itu, poin yang berbeda terkait dengan karakter khusus setiap negara yang menjadi identitasnya. Kelima, hasilnya menunjukkan bahwa diplomasi budaya dan bahasa oleh lembaganya menciptakan kekuatan yang signifikan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Di sisi lain, hasilnya menunjukkan bahwa diplomasi budaya dan bahasa merupakan *soft power*. Dalam hubungan ini, strategi yang dapat dipertimbangkan dalam kasus Indonesia adalah sebenarnya Indonesia memiliki perhatian dalam mengembangkan diplomasi budaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan banyak acara internasional untuk mempromosikan budaya Indonesia. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri juga memiliki banyak program termasuk diplomasi budaya yang dilakukan melalui KBRI dan program Beasiswa Bahasa



Indonesia untuk mahasiswa asing yang ingin belajar bahasa dan budaya Indonesia. Namun, masalahnya adalah bahwa peristiwa-peristiwa itu tampaknya kurang terintegrasi dan itu seperti memisahkan satu sama lainnya sebagai program pelayanan. Jadi, berdasarkan pengalaman Prancis (Alliance Francis), Jerman (Goethe Institute), Jepang (Japan Foundation), dan Cina (Confucius Institute) dibutuhkan lembaga khusus yang menjalankan diplomasi budaya dan bahasa Indonesia.

Pembentukan lembaga dapat membantu mengembangkan kinerja antara lembaga-lembaga Indonesia yang peduli pada diplomasi budaya dan bahasa. Dengan demikian, hal itu akan membuat diplomasi bahasa Indonesia lebih efektif dan efisien. Kerja sama internasional dapat dilakukan dengan universitas dalam negeri dan luar negeri melalui studi tentang Indonesia. Cara itu juga dapat dilakukan oleh Indonesia dengan menciptakan program khusus untuk mempromosikan budaya dan bahasa Indonesia dengan mendukung studi Indonesia di beberapa universitas di luar negeri. Dengan demikian, promosi budaya dan bahasa Indonesia dapat dicapai melalui program pendidikan.

Pemerintah Indonesia menyediakan beasiswa bagi siswa asing yang ingin mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Namun, studi tentang Indonesia di negara lain masih terbatas dan biasanya merupakan program sementara. Pemerintah harus berupaya meningkatkan studi tentang Indonesia di luar negeri dengan melibatkan perguruan tinggi di Indonesia dan memasukkan program tersebut di dalam agenda kerja sama intelektual mereka. Pemerintah Indonesia dapat mengundang orang Indonesia yang berdomisili di luar negeri, seperti pengusaha, pelajar, dan pekerja untuk mendukung program tersebut, termasuk mempertimbangkan pelibatan sektor swasta. Hal tersebut dapat meningkatkan kekuatan ekonomi dan politik untuk mendukung diplomasi budaya dan bahasa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menarik minat negara lain untuk mempelajari bahasa Indonesia dan budaya Indonesia? Jawabannya yang penting adalah meningkatkan kepentingan Indonesia (Pandjaitan, 2018). Peningkatan ekonomi dan politik Indonesia dalam hubungan internasional adalah kunci penting untuk mengangkat pentingnya posisi Indonesia.

Secara ekonomi, peningkatan perdagangan dan investasi dapat menjadi pembenaran untuk menjadikan bahasa Indonesia penting setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan ekonomi adalah upaya untuk mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perdagangan di wilayah tersebut (Pandjaitan, 2018). Upaya ini dapat diimplementasikan dengan mengembangkan bahasa Indonesia untuk program bisnis dan pelatihan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki potensi sebagai bahasa perdagangan di wilayah Asia Tenggara secara khusus (Pandjaitan, 2018). Sementara itu, secara politik, posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan berpotensi untuk meningkatkan pengaruh politik Indonesia dalam hubungan internasional. Dalam hal ini, hal tersebut merupakan alat potensial untuk mendukung diplomasi budaya dan bahasa Indonesia.

## **9. Keterkaitan Bahasa, Sastra, dan Budaya**

### **a) Bahasa dan Sastra**

Bahasa dan sastra memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya. Hubungan antara bahasa dan sastra dapat dikatakan bersimbiosis,



simbiosis ganda yang saling menguntungkan. Bahasa menginformasikan bagaimana sastra ditulis, yaitu ide-ide yang berbeda tentang bagaimana menggunakan bahasa dapat dilihat dalam sastra di periode yang berbeda-beda. Demikian juga halnya dengan sastra yang mengembangkan kata-kata baru dan idiom baru melalui media bahasa.

Bahasa adalah sarana komunikasi. Sastra adalah bentuk tertulis dari materi apa pun dalam bahasa tertentu, terutama tulisan-tulisan yang keluar dari pengetahuan dengan tema atau subjek tertentu. Jika kita berbicara tentang sastra, itu menambahkan sesuatu dalam keindahan bahasa. Sastra menciptakan minat membaca. Melalui puisi atau drama atau bentuk sastra lain umumnya penulis bermaksud untuk menyampaikan pesan. Ketika penulis tidak dapat mengatakan langsung kepada seseorang, penulis akan menyampaikan pesan itu secara tidak langsung melalui puisi atau lagu. Bentuk sastra adalah perhiasan bahasa. Bahasa akan menjadi efektif atau menarik dengan dekorasi sastra.

Setiap hasil penelitian, analisis, atau kreativitas pada subjek apa pun yang ditulis dalam bahasa tertentu, baik ilmiah maupun non-ilmiah, dapat dikatakan merupakan sastra. Bahasa dan sastra adalah dua kata yang tampak serupa dalam maknanya, tetapi secara tegas itu tidak demikian. Bahasa adalah kesatuan dasar sastra. Dapat dikatakan bahwa bahasa membuat sastra ada. Bahasa adalah sistem komunikasi utama manusia, sedangkan sastra adalah seni yang menggunakan bahasa. Dalam kata lain, bahasa adalah cara komunikasi secara lisan dan tulis dan sastra adalah penggunaan bahasa secara artistik. Sastra dihasilkan oleh penciptaan karya dalam bahasa tertentu oleh para penulis. Bahasa di sisi lain adalah cara ekspresi pikiran melalui suara mengartikulasikan. Ini adalah perbedaan utama antara bahasa dan sastra. Bisa saja ada bermacam-macam sastra karena adanya keberagaman bahasa. Bahasa terdiri atas bunyi, kata, dan kalimat. Cara menggabungkan kata-kata untuk menjadi kalimat penting dalam bahasa apa pun. Di sisi lain, sastra terdiri atas pikiran yang diungkapkan dalam bahasa tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sastra memiliki beberapa bentuk dan setiap bentuknya disebut sebagai bentuk sastra. Berbagai bentuk sastra adalah puisi, prosa, drama, epik, syair, cerpen, novel, dan sebagainya.

## **b) Budaya dan Sastra**

Hubungan antara budaya dan sastra adalah timbal balik. Budaya kita memengaruhi apa yang kita tulis dan apa yang kita tulis digunakan untuk menafsirkan sejarah kita. Namun, sejarah kita memengaruhi budaya, yang menciptakan lingkaran yang indah tempat ketiga hal tersebut bekerja bersama untuk mendefinisikan sekelompok orang, suatu bangsa, dan lain-lain. Hubungannya adalah bahwa sejarah membentuk budaya, sedangkan budaya dan sejarah membentuk sastra. Alasan mengapa sejarah membentuk budaya adalah karena sekelompok orang yang termasuk dalam kategori yang sama seperti beragama atau berbangsa sama. Kelompok orang dalam kategori seperti itu mengidentifikasi diri sebagai kelompok tertentu. Kelompok tersebut bertumbuh bersama



dengan budayanya. Sastra pada dasarnya adalah suatu bentuk sejarah yang berkembang melalui budaya seperti cerita.

Sastra adalah seni yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk membentuk gambar yang mencerminkan kehidupan sosial dan mengekspresikan pikiran dan perasaan penulis. Bentuk sastra yang pertama kali muncul adalah sastra lisan, yang umumnya terkait dengan musik sebagai puisi liris yang bisa dinyanyikan. Literatur modern biasanya membagi sastra dalam empat kategori: puisi, fiksi, prosa, dan drama. Budaya adalah fenomena sosial dan itu adalah hasil dari proses panjang. Pada saat yang sama, itu juga merupakan fenomena historis. Itu adalah akumulasi dari sejarah sosial. Budaya mengacu pada sejarah, geografi, adat istiadat, tradisi, cara hidup, sastra dan seni, norma-norma perilaku, cara berpikir, dan nilai-nilai suatu negara atau bangsa.

#### **10. Media Massa dalam Diplomasi Publik Bahasa Indonesia**

Media massa memiliki kekuatan untuk mencapai persamaan persepsi di kalangan masyarakat dunia yang kemudian dapat membantu keberhasilan proses diplomasi secara keseluruhan. Media massa tidak hanya berperan dalam diplomasi di tingkat domestik saja, tetapi juga sebagai alat untuk diplomasi lintas negara terkait dengan berbagai isu yang dapat membuat situasi nasional atau pun internasional menjadi lebih kondusif. Berbagai isu yang sering kali terjadi adalah terkait dengan adanya perbedaan pemahaman yang disebabkan perbedaan bahasa dan budaya di setiap negara. Di sini kemudian media bisa memiliki peran terdepan untuk mengurangi kesalahpahaman yang muncul akibat isu terkait. Media tidak hanya memiliki kekuatan sebagai alat diplomasi di lingkup domestik, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi lintas negara. Media massa dalam diplomasi publik masih mempunyai peran penting untuk dimainkan. Sering kali pemerintah perlu memperbaiki kebingungan yang timbul dari keputusannya yang tersiar di media, padahal pada saat yang sama mereka juga perlu menyampaikan kepada publik apa yang dimaksudkan tentang strategi jangka panjangnya. Media massa mengambil kekuatan dari pendekatannya untuk menjangkau targetnya melalui kekuatan bahasa dan teknologi untuk membentuk kesadaran publik.

Media dapat berperan menjadi penghubung antara masyarakat Indonesia dan publik internasional yang memiliki ketertarikan terhadap bahasa Indonesia. Mobilisasi yang tinggi terhadap bahasa Indonesia sebagai salah satu aktivitas diplomasi publik terhadap dunia global menjadi sebuah hal yang mudah untuk dicapai dengan adanya peran media massa. Dalam hal ini, bahasa Indonesia menjadi alat untuk mencapai tujuan nasional bagi Indonesia sehingga pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing menjadi hal yang sangat potensial bagi keberlangsungan proses diplomasi Indonesia. Potensi nyata dari peran media massa tersebut dapat dilihat dengan makin bertambahnya minat para mahasiswa asing untuk mempelajari bahasa Indonesia di lingkup domestik.

#### **11. Sastra dan Budaya dalam Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing**

Dalam konteks ini, sastra mengacu pada literatur bahasa Indonesia. Sebagai titik awal, sastra dapat didefinisikan sebagai teks tertulis dengan nilai artistik, termasuk di dalamnya ialah genre sastra tradisional, seperti puisi, fiksi, dan



drama. Di samping itu, diperlukan konsep sastra yang lebih luas untuk mencerminkan cakrawala budaya yang lebih luas dari media teks, seperti buku harian, autobiografi, surat, narasi anak-anak, dan narasi cerita rakyat. Sastra juga harus dipahami sebagai sistem sosial yang komunikatif. Konsep yang luas itu memungkinkan penjelasan yang lebih empiris dari perlakuan terhadap sastra yang meliputi empat sektor utama, yaitu produksi, distribusi, penerimaan, dan pemrosesan teks sastra.

Budaya adalah konsep yang lebih luas daripada sastra sehingga dalam konteks ini, akan dipertimbangkan kombinasi sastra dan budaya. Dalam pengajaran sastra, budaya memainkan peran yang berbeda. Salah satu perannya adalah sebagai ilustrasi atau titik awal untuk studi dan mediasi. Hal ini dipahami sebagai bagian dari peradaban masyarakat asing tertentu, dalam hal ini masyarakat Indonesia sehingga dengan belajar tentang sosial, sejarah, linguistik, dan implementasi budaya lainnya dalam teks-teks sastra spesifik dari budaya Indonesia dapat dimediasi.

Secara umum, modul bahasa Indonesia, terutama disampaikan di universitas tradisional, di fakultas seni atau sastra, atau dalam program bahasa terapan dan komunikasi antarbudaya. Dalam semua kasus seperti itu, sastra dipelajari sebagai bagian dari kurikulum bahasa Indonesia, sedangkan gambarnya lebih bervariasi ketika menyangkut budaya bahasa Indonesia sebagai bahasa bagi penutur asing di berbagai lembaga yang lebih luas, seperti sekolah bisnis, politeknik, atau perguruan tinggi. Mata kuliah bahasa Indonesia biasanya disampaikan melalui disiplin ilmu lain, seperti komunikasi, ilmu sosial, media, pariwisata, dan manajemen. Bidang dan program studi baru kadang-kadang dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek praktis dan terapan, seperti studi literatur terapan. Setelah menyelesaikan program pendidikan studi bahasa dengan fokus pada studi sastra atau budaya, para penutur asing seharusnya dapat menguasai hal-hal sebagai berikut:

- a. pengetahuan tentang latar belakang sejarah, budaya, sosial, dan politik dari para penulis sastra serta tema, gaya, fenomena budaya, dan social dari tulisan-tulisan mereka;
- b. pemahaman tentang beberapa konsep utama teori sastra;
- c. pandangan khusus tentang sejarah, bahasa, dan budaya;
- d. peran estetika sastra dalam sistem sosial dan komunikasi;
- e. wawasan mendalam tentang diferensiasi teks sastra dan nonsastra;
- f. kemampuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, mendiskusikan, mengontraskan penulis, karya mereka, sekolah sastra, dan kecenderungan utama dalam periode tertentu sastra Indonesia;
- g. pemahaman tentang berbagai tanda seperti simbol, gambar, kutipan, baik dalam teks tulis maupun audio-visual;
- h. pemahaman memahami sastra sebagai pusat pengembangan budaya dan bahasa;
- i. hubungan antara perkembangan sastra, budaya, dan bahasa;
- j. presentasi yang dikembangkan secara sistematis, baik lisan maupun tulis, dalam bahasa Indonesia tentang pengalaman membaca teks sastra, menonton teater, film, dan mendengarkan siaran radio; dan





- k. status yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, yang akan berdampak pada pembelajaran bahasa dan sastra sebagai bagian program pembelajaran bahasa Indonesia.

Dalam proses pelaksanaan program BIPA sebagai diplomasi publik Indonesia, opini penutur asing akan terbentuk dengan adanya tiga hal penting, yakni media, pengalaman interaksi, serta edukasi. Tiga hal penting itu akan mampu membentuk opini siswa BIPA selama belajar di Indonesia. Opini publik akan baik tentang Indonesia apabila pengalaman interaksi, edukasi yang dirasakan, serta berita yang ditulis di media mengarah kepada hal yang positif, begitu juga sebaliknya. Dalam upaya melakukan diplomasi publik, diperlukan kerja sama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah yang melibatkan metode diplomasi multijalur. Diplomasi ini memiliki relevansi dengan diplomasi publik karena terdapat peran yang signifikan dari pihak pemerintah, swasta, dan media dalam menjalankan diplomasi demi tercapainya kepentingan nasional.

Dalam relevansinya dengan diplomasi publik juga terlihat bahwa proses diplomasi tidak akan menjadi efektif jika hanya dibebankan pada pemerintah saja. Sejalan dengan tujuan diplomasi publik yang mengutamakan kontak *government to people* dan *people to people*, pihak pemerintah, swasta, dan media dapat berperan aktif dan bekerja sama dalam aktivitas diplomasi publik. Selain itu, pengajaran BIPA adalah sarana untuk menyebarkan bahasa Indonesia. Itu juga merupakan sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya dan masyarakat Indonesia serta berbagai macam informasi lain tentang Indonesia. Dengan cara tersebut, para penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia akan lebih banyak memahami secara komprehensif tentang budaya dan masyarakat Indonesia. Ini bukan hanya akan meningkatkan rasa hormat, melainkan juga dapat membantu meningkatkan kerja sama dan persahabatan internasional. Pengajaran BIPA dapat dilihat sebagai bagian dari strategi diplomasi publik Indonesia. Berbagai media dapat digunakan untuk melakukan strategi diplomasi publik tersebut.

Indonesia juga menggunakan program BIPA sebagai diplomasi publik dengan melibatkan aktor nonpemerintah untuk meningkatkan hubungan *government to people* dan *people to people*. Globalisasi, kemajuan bidang informasi dan komunikasi, serta tingginya minat penutur asing dalam mempelajari bahasa Indonesia menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan program BIPA di Indonesia. Hal itu terlihat dari rasio jumlah mahasiswa dan komposisi negara asing yang belajar bahasa Indonesia makin bertambah dan beragam. Pelaksanaan program BIPA merupakan serangkaian aktivitas diplomasi publik Indonesia terhadap dunia internasional.

Program BIPA digunakan untuk menginformasikan kepada publik seputar bahasa dan budaya Indonesia yang kemudian akan menimbulkan pemahaman bagi masyarakat internasional. Globalisasi telah membuka ruang bagi keterlibatan publik dalam menjalankan aktivitas diplomasi. Diplomasi di sini dimaknai bukan hanya sebagai urusan pemerintah dalam menjalankan misi untuk pencapaian kepentingan nasional, melainkan juga urusan seluruh unsur masyarakat. Bahasa dan budaya dapat berperan dalam diplomasi publik karena budaya adalah faktor penting yang dapat digunakan untuk membangun citra, strategi dalam diplomasi publik, dan juga hubungan *people to people*. Dalam diplomasi publik, budaya Indonesia memiliki dua peran penting, yakni membangun citra dan hubungan



*people to people*. Di samping itu, budaya juga menjadi alat pendukung diplomasi terutama untuk menarik perhatian orang-orang asing dan membangun citra positif bagi Indonesia di mata internasional. Hal itu disebabkan budaya terlihat lebih lunak sehingga tidak terkesan politis.

## **PENUTUP**

Posisi geopolitik Indonesia di masyarakat internasional menjadi makin penting. Di bidang ekonomi, Indonesia berada pada posisi ekonomi terbesar ke-16 di dunia dan merupakan anggota kelompok negara-negara G-20. Indonesia diproyeksi akan menduduki tempat ke-7 dari segi ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Peranan dan perkembangan positif di bidang-bidang lain, seperti sosio-ekonomi, politik, dan budaya, termasuk bahasa akan sangat membantu Indonesia mencapai kedudukan tersebut. Prospek bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan internasional sangat terbuka lebar. Potensi yang dimiliki bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi global tentu sangat besar. Dari sisi kebahasaan, bahasa Indonesia sangat layak untuk menjadi bahasa ilmu pengetahuan karena dapat mewadahi kepentingan untuk mendokumentasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia. Oleh karena itu, cara untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi suatu negara dan cara menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi internasional akan berlaku baik jika dilihat dari sudut potensi bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia sebagai pemilikinya.

Pendekatan komunikatif dengan mengapresiasi karya-karya kesusastraan etnis sebagai bahan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing merupakan manifestasi diplomasi budaya. Interaksi antara penutur jati dan penutur asing selalu biasanya menghadapi masalah antarbudaya. Para penutur asing sebagai pelajar dapat berusaha memahami budaya yang berbeda-beda. Pada akhirnya para penutur asing dapat menguasai bahasa Indonesia yang baik dan mampu untuk memahami budaya Indonesia sebagai budaya internasional.

Kesusastraan Indonesia pada dasarnya berasal dari sastra daerah. Isu-isu yang diangkat oleh para ahli sastra berasal dari budaya etnis lokal. Sastra etnis lokal menjadi dasar budaya setempat yang membentuk identitas nasional. Sastra etnis mempunyai kepentingan strategis sebagai materi pengajaran bagi orang-orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing merupakan unsur penting dalam diplomasi budaya.

Jawaban atas pertanyaan tentang strategi apa yang harus dilakukan untuk memberikan penguatan terhadap bahasa Indonesia agar dapat menjadi bahasa pergaulan internasional adalah strategi dari dua sisi, yaitu strategi kebahasaan, termasuk pemerayaan kosakata bahasa Indonesia dari bahasa daerah dan bahasa asing dan strategi nonkebahasaan, yaitu strategi yang dilakukan untuk mendorong dan mempercepat keinginan untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan internasional. Strategi ini hendaknya dilakukan untuk meningkatkan penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan internasional. Kedua strategi tersebut sama-sama penting untuk meningkatkan nilai tawar bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, baik di kawasan ASEAN maupun di kawasan yang lebih luas.

Posisi Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN, baik secara geografis maupun populasi, membawa peluang dan tantangan untuk



mengembangkan diplomasi budaya dan bahasa Indonesia. Ini adalah peluang karena dengan adanya posisi tersebut, banyak negara tertarik untuk mengadakan dan meningkatkan kerja sama dengan Indonesia. Ini harus dilihat sebagai undangan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dengan Indonesia. Namun, tantangan juga dapat ditemukan jika Indonesia tidak dapat mengambil manfaat dari posisinya. Ini berarti bahwa Indonesia harus mengembangkan strategi komprehensif untuk meningkatkan diplomasinya. Ketika ekonomi dan politik Indonesia menjadi lebih baik sehingga membuatnya lebih berpengaruh di kawasan, bahasa Indonesia bisa berpotensi sebagai bahasa regional Asia Tenggara karena bahasa Indonesia adalah pintu gerbang dan alat untuk belajar.

Akhirnya, pemakai bahasa Indonesia, baik penutur asli maupun penutur asing, hendaknya lebih bertanggung jawab terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Orang yang mencintai suatu hal mempunyai tanggung jawab atas baik atau buruk bagi hal tersebut. Pecinta bahasa Indonesia secara bersama-sama perlu memainkan peranan penting dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia secara positif sehingga bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pergaulan internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amaluddin. (2014). "Strategi penguatan bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan internasional". Dalam seminar internasional *Membangun Peradaban Bangsa melalui Politik Bahasa Nasional sebagai Bahasa Internasional dan Bahasa Ilmu Pengetahuan*, Malang: 4-5 November 2014.
- Andryansyah. (2012). *Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing*. Jakarta: Kemendikbud.
- Bekker, J.W. (1984). *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Constantinou, Costas M. (1996). *On the Way to Diplomacy*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Cowan, R., David, P., and Foray, D. (2000). *The explicit economics of knowledge codification and tacitness in industrial and corporate change*.
- Cummings, Milton C. (2003). *Cultural Diplomacy and the United States Governments: a Survey*. Centre for Arts and Culture.
- Der Derian, James. (1987). *On Diplomacy*. Oxford: Basil Blackwell.
- Frey, Linda S., and Marsha L. Frey. (1999). *The History of Diplomatic Immunity*. Columbus: Ohio State University Press.
- Eban, Abba. (1983). *The New Diplomacy*. London: Weidenfeld & Nicolson
- Effendi, Tonny Dian. (2016). "Bahasa Indonesia Diplomacy and Other Country Language Diplomacy Experiences". *Global Journal of Politics and Law Research*, Vol. 4, No.3, hlm. 21—28.
- Gani, Efrizal. (2000). *Pemberdayaan Pelajaran BIPA*. Bandung: Andira.
- Gura, R. (2006). cited by Pajtinka, E. 2014. Cultural diplomacy in theory and practice of contemporary international relations in *Journal of Political Science, Modern History, International Relations and Security Studies*.



- Holsti, K. J. (1978). *International Politics: a Framework for Analysis*. Edisi ke-3. New Delhi: Prentice Hall of India.
- Ismail, Taufik, (2000). Pengajaran sastra yang efektif dan efisien di SLTA. *Widyaparwa*. No.54/Maret 2000. Yogyakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdiknas, Balai Bahasa.
- Issundari, Sri & Iva Rachmawati. (2016). The role of citizen in Indonesian public diplomacy through Indonesian art and cultural scholarship. *International Journal of Political Science, Law and International Relations*, Vol.6, Issue 3, Jun 2016., hlm. 1—12.
- James, Alan. (1980). *Diplomacy and International Society*. *International Relations*, 6,6, 931—48
- Jemadu, Alexius. (2014). *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Edisi Ke-2. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lauk, K. (2002), cited by Pajtinka, E. 2014. Cultural diplomacy in theory and practice of contemporary international relations. in *Journal of Political Science, Modern History, International Relations and Security Studies*.
- Mahsun. (2013). *BIPA, Tingkatkan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional*.  
<http://edukasi.kompas.com/read/2013/10/23/1253102/BIPA.Tingkatan.Fungsi.Bahasa.Indonesia.Menjadi.Bahasa.Internasional>
- Mahsun. (2014). *Bahasa sebagai Strategi dan Diplomasi di dalam Facebook post*, <http://id-id.facebook.com/Kemdikbud.RI/posts/530896740353104>
- Marantika, S., Izza Firdausi dkk. (2017). *The analysis of Indonesia cultural diplomacy through angklung-in strengthening national identity*. 4th International Conference on Humanities, Social Science and Education (ICHSSSE) March 13—14, 2017 Dubai (UAE).
- Mellisen, Jan (ed). (2005). *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. New York: Palgrave MacMillan.
- Nicolson, Harold, (1963). *Diplomacy*. London: Oxford University Press.
- Nye, J. (2004). *Soft Power: the Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Pancraccio. (2007) cited in Pajintika, E. 2004. Cultural diplomacy in theory and practice of contemporary international relations. in *Journal of Political Science, Modern History, International Relations and Security Studies*.
- Pohan, Syafruddin, dkk, (2016). Digital diplomacy-maximizing social media in Indonesia's economic and cultural diplomacy. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol.81. hlm. 374. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.
- Ratna, Nyoman K. (2011). *Sastra dan Cultural Studies*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Antropologi Sastra: Peranan Unsur-Unsur Kebudayaan dalam Proses Kreatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riva'i, Ovy Soviati. (2010). *Laporan Akhir Pemetaan Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Asia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Ross, C. (2002). *Public Diplomacy Comes of Age*. *The Washington Quarterly*.
- Roy, S.L. (1995). *Diplomasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saini, K.M. (2005). Kearifan lokal di arus global. *Pikiran Rakyat*, 30 Juli 2005.



- Setyobudi, Imam. (2009). Etnografi dan genre sastra realisme sosial dalam “Acintya”, *Jurnal Penelitian Seni Budaya*, Jilid 1. hlm. 109—118.
- Sztefka, B. (2008). *A Case Study on the Teaching in a Foreign Language*.  
[http://www.beta\\_iateflhit.bg/pdfs/case\\_study.pdf](http://www.beta_iateflhit.bg/pdfs/case_study.pdf)
- Tran, Van Dinh, (1987). *Communication and Diplomacy in a Changing World*. Norwood, NJ: Ablex.
- Wheeler, Anita. (2014). Cultural diplomacy, language planning and the case of the university of nairobi, confucius institute. in *Journal of Asian and African Studies* (49). Los Angeles. hlm. 48—65.
- Wyszomirski, J.M. (et al). (2003). *International Cultural Relations: A Multi Country Comparison*.  
<http://www.culturalpolicy.org/pdf/MJWpaper.pdf>

#### **WAWANCARA**

- Pandjaitan, Luhut, (2018, 12 Mei). Wawancara Menteri Koordinator Urusan Maritim, Republik Indonesia dengan penulis di Delhi.
- Yahya, Arief. (2018, 8 Mei). Wawancara Menteri Pariwisata Republik Indonesia dengan Penulis.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Kishor Kumar Das  
Judul Makalah : Diplomasi Strategi Bahasa dan Sastra: Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pergaulan Internasional  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.00  
Moderator : Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.  
Pencatat : Retno Handayani

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Bahasa dan sastra mempunyai hubungan yang erat karena bahasa dan sastra membentuk pikiran dalam hidup.
2. Posisi Indonesia diprediksi berada pada peringkat ke-7 secara internasional. Indonesia memiliki peranan dan perkembangan positif di berbagai bidang, seperti sosio-ekonomi, politik dan budaya, termasuk bahasa yang akan sangat membantu Indonesia untuk mencapai kedudukan tersebut.
3. Bahasa yang ditambah dengan pemahaman adalah salah satu cara untuk membentuk kekuatan lunak.
4. Bahasa dalam diplomasi adalah istilah yang secara jelas dapat ditafsirkan dalam beberapa cara.
5. Bahasa Indonesia sangat layak menjadi bahasa ilmu pengetahuan karena dapat mawadahi kepentingan untuk mendokumentasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia.
6. Karya-karya kesusastraan etnis sebagai bahan pengajaran bagi penutur asing merupakan manifestasi diplomasi budaya Indonesia.
7. Terdapat strategi tertentu yang dapat menguatkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Prof. Emi Emilia  
Instansi : PPSDK

**Pertanyaan:**

Saya mendengar bahwa jumlah murid di KBRI India banyak sekali. Dari pengalaman Bapak, mengapa mereka tertarik untuk belajar bahasa Indonesia?

**Jawaban:**

Indonesia dan India sebenarnya memiliki kedekatan. Secara praktis, orang-orang India tidak mengetahui tentang kedekatan tersebut, tetapi sebenarnya dari sisi sejarah ada kedekatan antara Indonesia dan India.

**Penanya 2**

Nama : Widi Suharto  
Instansi : Tulungagung



**Pertanyaan:**

Jika dibandingkan, mungkinkah ada kesamaan antara bahasa Indonesia dan bahasa India? Apakah di sana ada beragam suku dan bahasa juga, lalu diambil satu bahasa untuk mempersatukan?

**Jawaban:**

Saya berani mengatakan bahwa bahasa India tidak terlalu baik sebagai bahasa nasional. Itu menjadi isu politik di sana. Bahasa India secara resmi menjadi bahasa persatuan. Bagian utara sudah menerima kebijakan itu, sedangkan di bagian selatan mereka menerima, tetapi secara praktik mereka tidak melaksanakan percakapan dalam bahasa Hindi.

**Penanya 3**

Nama : Aji

Instansi : Plaza.com

**Pertanyaan:**

Bagaimana masyarakat India melihat kami masyarakat Indonesia? Bagaimana masa depan, peluang, dan kendala yang dihadapi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional?

**Jawaban:**

Mereka biasanya berinisiatif untuk belajar bahasa Indonesia. Yang penting adalah KBRI giat dalam melakukan kegiatan. Mereka harus mengetahui masyarakat Indonesia lebih dahulu, misalnya dari musik dan tari-tarian yang ditampilkan di India. Diperlukan keinginan dan komitmen dahulu secara praktis. Kendala pasti ada karena ada inisiatif. Intensitas dan waktu belajar bahasa Indonesia kurang, contohnya mahasiswa hanya belajar dua bulan. Pandangan India terhadap masyarakat Indonesia lebih teoretis, misalnya dari cerita-cerita Mahabharata atau cerita-cerita lain. Hal itu memberi peluang bagi bahasa Indonesia.

**Penanya 4**

Nama : Herik

Instansi : IJTI

**Pertanyaan:**

Ada rasa rendah diri yang melatarbelakangi anggapan bahwa bahasa Inggris lebih keren daripada bahasa Indonesia. Apakah di India juga ada rasa rendah diri terhadap bahasanya? Adakah sikap dan regulasi dari negara India agar bahasa India lebih eksis?

**Jawaban:**

Bukan rasa rendah diri, melainkan masalah politik yang terjadi di India. Ada beberapa partai politik yang berkuasa. Jadi, di India lebih dominan masalah politik bukan masalah rasa rendah diri.



### **Isu-Isu Penting:**

1. Diplomasi kebahasaan sebaiknya dilakukan di dalam negeri dan luar negeri. Diplomasi perlu dilakukan, baik oleh orang Indonesia maupun oleh orang-orang asing di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus tentang upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Harus ada langkah-langkah lebih lanjut untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Badan Bahasa harus memiliki satu bagian khusus untuk mengenalkan bahasa Indonesia di luar negeri, tidak hanya di dalam negeri (yang dilakukan melalui BIPA).
2. Dari sisi kebahasaan, bahasa Indonesia berpeluang dan sangat layak untuk menjadi bahasa ilmu pengetahuan karena dapat mewartakan kepentingan untuk mendokumentasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia. Cara untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi suatu negara dan cara menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi internasional akan berjalan baik jika dilihat dari sudut potensi bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia sebagai pemiliknya.





**9. Amunisi Sepatah Bait: Telaah Bahasa dan Sastra sebagai Sarana Ketahanan dan Keamanan Indonesia Tahun 1945—1966**

**AMUNISI SEPATAH BAIT:  
TELAAH BAHASA DAN SASTRA SEBAGAI SARANA KETAHANAN  
DAN KEAMANAN INDONESIA TAHUN 1945—1966**

**Yebqi Farhan**

SMPI Nurush Shobah-Jember

krtfarhan@gmail.com

**Abstrak**

Bahasa dan sastra merupakan sesuatu yang tidak begitu tampak oleh pandangan manusia, tetapi memiliki dampak yang tidak sedikit, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Seiring berkembangnya waktu, sastra makin meluas hingga akhirnya menyentuh fungsi sebagai sarana penjaga kedaulatan negara. Penulis menelaah peran sastra sebagai alat ketahanan dan keamanan negara dalam menjaga kedaulatan negara. Melalui pendekatan ilmu sejarah dan teori ilmu sastra, diketahui bahwa sastra sangat berperan dalam menjaga kedaulatan negara. Melalui sajak-sajak nasionalisme dan patriotisme, sastra menjadi sebuah kekuatan yang tidak terbantahkan sebagai penyemangat angkatan bersenjata dalam menjalankan tugasnya menjaga ketahanan dan keamanan negara. Selain itu, bahasa dan sastra juga menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang pecah belah akibat geografis, tetapi bersatu dalam hal politis dan ideologis. Telah kita ketahui bahwa persatuan dan kesatuan adalah modal utama dalam menjaga kedaulatan negara sehingga sastra tidak dapat disepelekan peranannya bagi negara Indonesia.

**Kata-kata kunci:** bahasa, sastra, ketahanan, negara

**Abstract**

*Language and literature are not so visible to the human view, but have big impacts, both in the form of positive and negative impacts. As time went on, literature expanded to finally touch the function as a means of guarding state sovereignty. The author examines the role of literature as a tool of state security and security in safeguarding state sovereignty. Through the approach of historical science and the theory of literature, it is known that literature plays an important role in maintaining state sovereignty. Through the poems of nationalism and patriotism, literature becomes an undeniable force as an encouragement for the armed forces to carry out their duties to maintain national security. In addition, language and literature have also become a unifying Indonesian nation that is geographically fragmented, but united in political and ideological terms. We have seen that unity and unity are the main capital in safeguarding the sovereignty of the country so that literature cannot be underestimated for the role of the Indonesian state.*

**Keywords:** language, literary, role, state

**PENDAHULUAN**

Penelaahan tentang sarana ketahanan negara kita tercinta, yaitu Indonesia, tidak terlepas dari angkatan bersenjata yang dalam penyebutannya sering berganti seiring dengan perkembangan negara. Sudharmono (1983) menyatakan bahwa



untuk menjaga ketahanan negara pascakemerdekaan, kita mengenal Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan Tentara Republik Indonesia (TRI), yang kemudian berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selain itu, pada tanggal 1 Juli 1946 dibentuk pula Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai badan kelengkapan negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dalam negara. Seiring berjalannya waktu, didirikan banyak alat kelengkapan negara yang notabene bergerak di bidang militer. Namun, perlu digarisbawahi bahwa dalam makalah ini tidak akan dibahas mengenai angkatan militer Indonesia yang makin hari makin canggih atau diulas kehebatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), tetapi akan diulas keterlibatan dan peran kesusastraan dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara.

Sering kita lihat dan kita dengar dalam pelatihan militer, para anggota menyanyikan atau pun mengeluarkan sepatah dua patah kata sebagai penanda semangat dalam latihan atau membulatkan tekad sebagai pengabdian pada garis terdepan alat ketahanan dan keamanan negara. Tanpa kita sadari, nyanyian yang didengarkan merupakan bagian dari bahasa dan sastra yang tidak luput dalam diri seorang militer. Hal itu menjadi sesuatu yang unik dan menarik untuk dikaji mengingat sastra merupakan sesuatu yang tidak begitu tampak oleh mata, tetapi dapat dirasakan pengaruhnya bagi bangsa.

Dalam perkembangannya, sastra modern memiliki lebih banyak kelebihan daripada sastra klasik. Salah satu kelebihan sastra modern adalah berperan sebagai penyampai misi ideologi, baik sebagai alat pendidikan, alat propaganda, maupun “energi” dalam sebuah perjuangan. Peran sastra sebagai sarana pertahanan dan keamanan negara makin meluas dan makin menyebar pengaruhnya pada semua jenjang dan lapisan masyarakat.

Setelah menguraikan latar belakang tentang peran sastra yang pada masa modern ini makin meluas kegunaannya, dalam makalah ini penulis menguraikan pokok permasalahan, yaitu (1) Apa wujud karya sastra Angkatan ‘45 sampai dengan ‘66? dan (2) Apa peran bahasa dan sastra sebagai sarana ketahanan dan keamanan negara?

Kajian mengenai peran bahasa dan sastra dalam upaya menjaga ketahanan negara menurut hemat penulis adalah sesuatu yang urgen sebab dewasa ini peran bahasa dan sastra sepertinya mengalami degradasi apabila dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Sebuah kekhawatiran muncul bahwa jika pemahaman semacam itu tidak segera ditelaah dan dipublikasikan, bukanlah hal yang mustahil jika bahasa dan sastra dikesampingkan peranannya dalam menjaga ketahanan dan keamanan negara akibat derasnya arus globalisasi yang selalu membanjiri intelektualitas bangsa. Nilai kearifan lokal (*local genius*) yang santun, ramah, saling menghormati, arif, dan religius seakan terkikis dan tereduksi gaya hidup instan dan modern. Kadek Dedy Herawan dan I Ketut Sudarsana (2017)) menyatakan bahwa masyarakat sangat mudah tersulut emosinya, pemarah, brutal, kasar, dan vulgar tanpa mampu mengendalikan hawa nafsunya, seperti perilaku para demonstran yang membakar kendaraan atau rumah, merusak gedung, serta berkata kasar, dalam berunjuk rasa yang ditayangkan di televisi. Fenomena itu dapat menjadi representasi melemahnya karakter bangsa ini, yang terkenal ramah, santun, berpekerti luhur, dan berbudi mulia (hlm. 224).



## LANDASAN TEORI

Landasan teori yang digunakan dalam pembahasan makalah ini adalah pendekatan sejarah dengan tetap berlandaskan pada teori-teori sastra pada umumnya, tetapi dalam hal ini penulis menggunakan sosiologi sastra sebagai fondasi dari penelitian. Pendekatan sejarah dipilih karena pembahasan yang ada di dalamnya memuat data-data yang telah lampau sebagai gambaran historis dari peran sastra. Kekhawatiran dalam penggunaan pendekatan sejarah memang menghadapi hasil interpretasi yang subjektif (sesuai dengan sudut pandang/kepentingan suatu pihak). Namun, dalam kesempatan ini penulis mengikuti pernyataan seorang sejarawan, Louis Gottschalk, dalam Moh. Hadi Sundoro (2009) yang mengatakan bahwa dalam sejarah seharusnya sejarawan menghindari subjektivitas dalam melakukan seleksi, interpretasi dan hal lain yang berhubungan dengan kajian sejarah (hlm. 197).

Penelitian ini difokuskan pada kajian sejarah. Penulis membatasi kajian pada bidang bahasa dan sastra dalam kurun waktu 1945—1966. Pemilihan periodisasi tersebut didasarkan pada tidak stabilnya kondisi politik di Indonesia yang berakibat pada terujinya ketahanan dan keamanan negara. Tentu dalam menghadapi kondisi politik semacam itu, negara dan semua lapisan masyarakat menyusun siasat untuk mengatasinya, tidak ubahnya sastrawan yang turut berkarya dalam mengatasi kesulitan politik yang terjadi.

Sebuah karya sastra pada setiap tahapan waktu juga berhubungan dengan situasi dan kondisi pada masa itu. Karya sastra yang lahir pada masa penjajahan sebagian besar berisikan penindasan-penindasan pihak kolonial terhadap kaum pribumi. Karya sastra pada masa 1900-an menggambarkan suasana pergerakan, feminisme, dan kemerdekaan. Begitu juga dengan karya sastra yang lahir pada kurun 1945—1965 yang berisikan semangat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan sebab kondisi Indonesia secara sosial dan politik masih berada dalam ketidakstabilan yang memungkinkan sastrawan untuk berkarya sesuai dengan realitas yang terjadi. A. Teeuw, seorang ahli sastra berkebangsaan Belanda, mengutarakan dengan penuh kehati-hatian bahwa sebuah roman merupakan salah satu dokumen sosial. Lebih lanjut A. Teeuw (2015) menjelaskan bahwa dalam sebuah karya sastra ada keterpaduan antara kenyataan dan khayalan meskipun data yang disajikan dalam sastra atau roman sering tidak dipercayai (hlm. 181). Akan tetapi, jika ditelaah lebih mendalam mengenai karya sastra yang hadir dalam batasan waktu kajian ini sangat menguatkan bahwa sastra yang dihasilkan sesuai dengan realitas, hanya saja model penyampaiannya adalah melalui metode atau gaya sastra. Hal itu sejalan dengan pemikiran T.S Elliot yang dikutip oleh Rene Wellek dan Austin Warren Rene (2016) bahwa sastra bagi seorang sejarawan adalah dokumen sosial (hlm. 25).

Menurut Laurensen dan Swingewood dalam Syahrizal, dkk. (2013: 57), terdapat tiga perspektif berkaitan dengan penelitian sosiologi sastra, yaitu

1. penelitian yang berfokus bahwa karya sastra adalah dokumen sosial yang di dalamnya terdapat refleksi yang terjadi pada masa tersebut;
2. penelitian yang berfokus bahwa sastra berisi situasi sosial penulisnya; dan
3. penelitian yang berfokus bahwa sastra berisi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya.

Makalah ini lebih mengacu pada poin terakhir bahwa sastra berisi peristiwa sejarah. Poin ke-3 merupakan cerminan karya sastra yang lahir antara tahun



1945—1966 sebab kondisi sosial politik yang terjadi pada masa tersebut turut mengilhami sastrawan untuk berkarya mengingat karya sastra, baik secara langsung maupun tidak, turut memberikan sumbangan terhadap negara.

Prof. Sardanto Tjokrowinoto dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Diponegoro-Semarang (1989) mengutarakan bahwa terdapat lima sumbangan bahasa dan sastra terhadap pembangunan nasional yang disebut dengan *Pancagatra*. Salah satu dari *Pancagatra* tersebut adalah sumbangsih bahasa dan sastra bagi pertahanan dan kedamaian negara (hlm. 12). Lebih lanjut, Sardanto menambahkan bahwa anggota militer yang dididik dengan keras dan diberi semangat yang membara adakalanya mendapatkan santapan rohani untuk dilembutkan hatinya atau sekadar diberi hiburan sehingga mereka tidak hanya berada pada ketegangan karena berada di garis terdepan dalam peperangan (hlm. 22-23). Salah satu santapan kerohanian tersebut ialah karya sastra, seperti sajak, cerita, novel, prosa, dan drama.

Menurut Anderson dalam Wildan (2010), nasionalisme hadir dalam berbagai aspek, seperti taman makam pahlawan, makam prajurit yang tidak dikenal, dan *cenotaph* (tugu peringatan bagi para tentara yang gugur dan dimakamkan di tempat lain), lagu kebangsaan, bendera nasional, kesamaan bahasa ibu, kesepahaman bahasa agama, pandangan-dunia tentang agama, dan gambar-gambar (ukiran, lukisan, atau sketsa). Hal-hal seperti itulah yang disebut sebagai akar-akar budaya nasionalisme. Dengan akar-akar budaya itulah direkabayangkan hal-hal yang bersifat imajinatif sehingga menjadi sangat nyata karena sifat audio-visualnya. Anderson menunjukkan dua bentuk pembayangan itu, yaitu novel dan surat kabar.

## PEMBAHASAN

Peran bahasa dan sastra, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tidak dapat dipandang sebelah mata. Meskipun dalam fakta sejarah terdapat beberapa peristiwa yang memunculkan anggapan bahwa bahasa dan sastra tidak ikut andil dalam perjuangan menggapai kemerdekaan, hanya saja menurut hemat penulis setelah kemerdekaan diraih peran sastra mengalami penurunan “tensi” dalam sepak terjangnya. Hal itu dipengaruhi oleh masuknya beberapa paham luar akibat adanya globalisasi. Dewasa ini, bangsa kita lebih mendewakan kehebatan sastra-sastra luar yang belum tentu sesuai dengan karakter serta kepribadian bangsa Indonesia. Padahal, jika dikaji lebih dalam, para *Founding Fathers* bangsa ini telah mewariskan pusaka berupa pemikiran-pemikiran beraliran bahasa dan sastra dalam menggapai kemerdekaan. Tidak terlalu berlebihan kiranya jika penulis beranggapan bahwa sastra yang telah dihasilkan berbobot sehingga berhasil menumbuhkan semangat juang hingga berhasil meraih kemerdekaan.

Sovia Rangkuti Hasibuan (2005), sebagai seorang perempuan yang berkecimpung dalam dunia sastra, mengajak semua lapisan khususnya fakultas sastra untuk menggali kembali kehebatan sastra-sastra pada masa perjuangan untuk ditekuni sebagai salah satu wujud bela negara di bidang bahasa dan sastra dengan tindakan nyata berupa penyusunan buku berjudul *Bunga Rampai Kesusastraan Perjuangan Kemerdekaan* atau *The Anthology of Literature by the Indonesian Founding Fathers*. Tentu tujuan dari imbauan ini adalah untuk membangkitkan kembali sastra Indonesia pada masa kemerdekaan yang telah teruji karyanya.



## 1. Kesusastraan dalam Lintasan Sejarah Indonesia

Ucuk Fuadhiyah (2011) mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika* sesungguhnya kaya akan budaya sastra dan kesenian tradisional di setiap daerah. Keanekaragaman seni budaya tersebut dapat dilihat dari aspek bahasa, seni, dan adat istiadat. Namun, ironisnya tidak begitu banyak generasi muda sebagai penerus budaya yang berminat melestarikan atau pun sekadar mempelajari seni budaya lokal dan nasional. Dapat kiranya dijadikan sebuah *adigium* bahwa jika berbicara masalah sastra, Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan karya sastra.

Masa kesusastraan Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak masa klasik, tepatnya pada masa Hindu-Buddha. Pada kurun waktu itu telah dihasilkan kesusastraan yang mengandung nilai tinggi. Karya-karya sastra yang dimaksud dapat ditemui sejak masa feodal menancapkan hegemoninya di nusantara (Indonesia). Kesusastraan yang dimaksud berupa kitab dan kakawin yang sengaja dikarang oleh ahli sastra kerajaan (pujangga) atas perintah raja dengan kepentingan tertentu. Lidia Kieven (2017) mengatakan bahwa kesusastraan pada masa tersebut secara substansial dilatarbelakangi oleh agama, kisah percintaan (panji), dan politik. Hasil kesusastraan pada masa tersebut masih bercampur baur antara mitos, legenda, dan fakta sejarah. Kejadian semacam itu sedapatnya kita maklumi sebab belum ada metodologi penulisan yang “dibakukan”. P.J Zoetmulder (1983), sebagai seorang ahli yang meneliti sastra klasik, menekankan bahwa pada masa itu setidaknya terdapat dua macam puisi yang berbeda, yaitu jenis kakawin dan kidung. Keduanya memang berbeda sebab menurut Zoetmulder kakawin menggunakan metrum-metrum India, sedangkan kidung menggunakan metrum Jawa. Dalam hal bahasa pun keduanya memiliki perbedaan. Kakawin menggunakan bahasa Jawa Kuno, sedangkan kidung menggunakan bahasa Jawa Pertengahan. Sekadar pemberitahuan saja, bahwa kesusastraan pada masa itu masih banyak dipetik untuk dijadikan landasan ideologi, doktrin, atau pun prinsip kehidupan. Sebagai contoh ialah istilah *Pancasila* yang diambil dari *Kakawin Negarakretagama* dan *Bhinneka Tunggal Ika* yang dipetik dari *Kakawin Sutasoma*.

Setelah masa kerajaan Hindu-Buddha berakhir, nusantara ditegakkan dengan kerajaan Islam hingga akhirnya agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia sampai saat ini. Bersamaan dengan berdirinya kerajaan Islam di nusantara, banyak sastrawan yang tidak kalah hebat dengan sastrawan pada masa sebelumnya. Pada masa ini muncul pujangga besar, seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Arraniri, Ranggawarsita, dan Yasadipura, dengan karya sastra lebih beragam daripada masa sebelumnya. Keberagaman karya sastra yang dimaksud berupa hikayat, babad, suluk, syair, dan kitab.

Soekono Wirdjosoedarmo (1998) mengatakan, puncak peradaban kerajaan-kerajaan Islam tidak berlangsung lama sebab kolonialisasi Eropa segera menancapkan politiknya di Indonesia. Pada masa sastra peralihan (1800—1908) ini awalnya hanya orang-orang Eropa saja yang dapat berkarya melalui karya sastra meskipun ada sebagian kecil orang pribumi yang menghasilkan karya sastra. Lahirnya karya sastra pada masa kolonial (peralihan) berupa sastra pembaruan yang dipelopori oleh seorang sastrawan, Abdullah Bin Abdul Kadir Munsyi. Genre karya sastra peralihan ini dilatarbelakangi oleh penderitaan yang dirasakan bangsa Indonesia yang hidup di bawah belenggu penjajahan. Secara



garis besar, memang fenomena-fenomena yang diangkat oleh sastrawan berasal dari kehidupan yang pernah dialami. Berdasarkan keadaan semacam itu, lahirlah beberapa karya sastra semacam novel dan cerita pendek yang bertujuan untuk membela bangsa Indonesia selaku bangsa yang tertindas. Karya semacam ini dihasilkan oleh orang-orang Belanda asli dan Belanda peranakan yang ditujukan kepada penguasa. Dalam lembaran sejarah Indonesia, muncul dua karya sastra besar yang memiliki dampak luar biasa terhadap kehidupan bangsa Indonesia, yaitu *Max Havelaar* karya Multatuli (nama samaran dari Douwes Dekker) dan *Een Eereschult* yang dapat diartikan ‘hutang budi’ yang ditulis oleh Van Deventer dan diterjemahkan oleh Hans Bague Jassin (1972) dengan judul *Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda*. Adanya novel Max Havelaar berdampak pada dihapuskannya *Cultuur Stelsel* (‘tanam paksa’) pada tahun 1870, sedangkan tulisan *Hutang Budi* berdampak pada adanya Politik Etis tahun pada 1901.

Pada permulaan abad XX bermunculan karya sastra, khususnya karya sastra kaum pergerakan, yang berisi ungkapan hati dalam surat kabar dan koran. Tidak terhitung jumlah karya sastra yang dihasilkan pada periode ini. Hampir semua karya sastra berisi seruan atas penderitaan yang dialami bangsa Indonesia. Sangat menyentuh sekali jika kita membaca karya sastra pada masa ini sebab mereka mengalami langsung tekanan dan penindasan-penindasan yang dilakukan pihak kolonial kepada bangsa Indonesia, seakan-akan tulisan karya sastra pada masa itu berisi jeritan kesakitan karena luka akibat penderitaan dan penindasan oleh kaum penguasa. Sebagian karya sastra yang tercipta pada masa pergerakan menyuarakan feminisme (perjuangan keadilan bagi kaum wanita), dari kondisi sosial semacam itu muncullah inspirasi bagi sastrawan untuk berkarya. Salah satunya adalah Sutan Takdir Alisyahbana (dalam *Pamusuk*, 1982) yang tertarik pada ilmu dan filsafat mencurahkan hasil pemikirannya melalui karya sastra dengan menempatkan perempuan sebagai media penyampai seperti tergambar dalam novel *Layar Terkembang* dalam Ekarini Saraswati (2011) yang mengangkat tokoh Tuti sebagai pejuang kemerdekaan dan persamaan hak perempuan. Berdasarkan banyaknya karya sastra yang muncul dan banyaknya sastrawan dalam sejarah sastra lahirlah Angkatan ‘20 atau Balai Pustaka yang disusul angkatan Pujangga Baru, Angkatan ‘45, sampai dengan Angkatan 2000. Peran angkatan sastra inilah yang akan penulis kupas dalam korelasinya menjaga ketahanan dan keamanan negara tahun 1945—1966.

## **2. Bahasa dan Sastra dalam Menggapai dan Mempertahankan Kemerdekaan**

Kelompok sastrawan Angkatan ‘45 banyak menghasilkan sajak-sajak tentang perjuangan menggapai kemerdekaan karena masa itu bersamaan dengan berlangsungnya *revolusi* Indonesia (1945—1949). Melalui sajak-sajak ini sastrawan berusaha berperang melalui “senjata sastranya” yang dimiliki untuk turut andil dalam perjuangan menuju pintu gerbang kemerdekaan. Sajak-sajak yang dihasilkan adalah sajak yang menimbulkan rasa nasionalisme (cinta tanah air) sehingga sebagian dari pejuang tidak patah arang untuk menegakkan bambu kuningnya sebagai senjata. Bangsa Indonesia juga tergugah semangat perjuangannya untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih.

Sardanto Tjokrowinoto (1989) mengatakan bahwa beberapa sastrawan yang tergabung dalam Angkatan ‘45 di antaranya adalah Usman Ismail, B.H Lubis, Nursyamsu, Purwa Atmaja, dan seorang sastrawan yang melegenda Chairil



Anwar dengan karyanya *Kerawang Bekasi*. Barisan sastrawan yang telah disebutkan tersebut memberikan semangat juang kepada barisan pelopor Badan Ketahanan Rakyat untuk terus berperang demi menjaga kedaulatan negara. Sebagai gambaran, berikut penulis petik karya sastra Angkatan '45 yang menimbulkan nasionalisme dalam menjaga ketahanan dan pertahanan negara.

### **Diponegoro**

Di masa pembangunan ini  
Tuan hidup kembali  
Dan bara kagum menjadi api  
Di depan sekali tuan menanti  
    Tak gentar, lawan banyaknya seratus kali.  
    Pedang di kanan, keris di kiri  
    Berselempang semangat yang tak bisa mati.

Maju  
Ini barisan tak bergenderang-berpalu  
Kepercayaan tanda menyerbu.  
Sekali berarti  
Sudah itu mati.

    Maju  
    Bagimu Negeri  
    Menyediakan api.

Punah di atas menghamba  
Binasa di atas ditindas  
Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai  
Jika hidup harus merasai

    Maju  
    Serbu  
    Serang  
    Terjang

Chairil Anwar. Februari, 1943.  
Sumber: *Budaya*. Th. III, No. 8, 1954

Sajak Diponegoro di atas memberikan semangat juang luar biasa kepada bangsa Indonesia untuk kembali bangkit merebut kemerdekaan dengan semangat yang menyala-nyala bagaikan api yang siap menyambar apa pun seperti semangat sang pahlawan Pangeran Diponegoro yang rela berkorban demi harga dirinya di hadapan Belanda.

Cerita-cerita lama (prosa) yang merupakan bagian dari sastra juga turut andil dalam pertahanan dan keamanan negara. Telah kita ketahui bahwa nenek moyang kita adalah bangsa yang hebat dan sempat mencapai puncak kejayaan. Dari kejayaan tersebut timbul banyak pejuang gagah berani yang diabadikan dalam bentuk hikayat tentang kepahlawanan seseorang. Di kala peperangan sedang berkecamuk dan prajurit atau pasukan sedang kelelahan, mereka perlu mendengar hikayat atau cerita-cerita yang dapat membangkitkan semangat. Misalnya pada saat masyarakat Aceh hampir putus asa dalam mengusir Portugis, diceritakan riwayat seorang gagah berani bernama Amir Hamzah yang memiliki keberanian



luar biasa dalam menjaga harga diri tanah airnya sehingga masyarakat Aceh kembali tersiram “api” semangat untuk berjuang kembali hingga akhirnya Portugis berhasil diusir dari Tanah Rencong, Aceh.

Bidang sastra yang lain, seperti drama, juga turut berandil dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Salah satu wilayah yang sering mementaskan drama adalah Kota Bandung. Kemungkinan besar penyebabnya adalah karena Kota Bandung merupakan sasaran penyerangan utama di Jawa Barat oleh pihak sekutu. Adeng (2012) mengatakan bahwa untuk lebih menggelorakan semangat perjuangan, grup-grup sandiwara sering meyenggarakan pementasan sandiwara. Pada masa itu, lakon-lakon yang dipentaskan bertema perjuangan, seperti “Pelangi Hijrah”, “Rebutlah Bandung”, dan “Bandung Lautan Api”. Dalam pementasan drama “Halo-hallo, Bandung” juga diperdengarkan lagu perjuangan (hlm. 49). Dalam *Pikiran Rakyat* (1994) disebutkan, begitu pun dengan kota-kota yang lain muncul lagu “Halo-halo, Bandung” dalam berbagai versi, seperti “Halo-halo, Jakarta”; “Halo-halo Semarang”; dan “Halo-halo, Surabaya” (hlm. 50).

Selain di bidang sastra, di bidang bahasa juga diciptakan beberapa semboyan, slogan, atau salam yang dapat menyatukan nusantara karena menimbulkan keberanian untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, yaitu nyawa. Seperti yang penulis lansir dari buku *30 Tahun Indonesia Merdeka*, terdapat semboyan “Merdeka atau Mati” dan “Sekali Merdeka, tetap Merdeka” sembari mengangkat tangan setinggi bahu dan posisi tangan mengepal menghadap ke depan.

Pascakemerdekaan hingga tahun 1950-an banyak diciptakan lagu-lagu perjuangan oleh sastrawan Angkatan ‘45 atau pun pencipta lagu untuk membangkitkan semangat pada masa itu. Secara *de facto*, Indonesia merdeka pada tahun 1945, tetapi secara *de jure*, Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1949 yang ditandai dengan terselenggaranya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Meskipun telah mendapatkan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda, kondisi politik di Indonesia masih belum stabil. Hal itu juga turut mengilhami para sastrawan untuk berkarya dalam bidang bahasa dan seni. Demi menimbulkan semangat juang, di kalangan militer juga diciptakan lagu-lagu yang menimbulkan semangat dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Selain itu, para seniman juga turut berjuang melalui lagu-lagu perjuangan. Salah satu nyanyian yang kita kenal hingga sekarang adalah *Bangun Pemuda Pemuda* karya Alfred Simanjuntak, *Berkibirlah Benderaku* karya Ibu Sud dan lagu yang dapat menyatukan Indonesia meskipun terpecah belah karya R. Soerardjo dengan judul *Dari Sabang Sampai Merauke*. Berikut ini ialah lirik lagunya.

### **“Dari Sabang Sampai Merauke”**

Karya: R. Soerardjo

Dari Sabang Sampai Merauke Berjajar Pulau-pulau  
Sambung Menyambung Menjadi Satu Itulah Indonesia  
Indonesia Tanah Airku Aku Berjanji Padamu  
Menjaga Tanah Airku  
Tanah Airku Indonesia.





Wildan (2010) menjelaskan, jika dicermati dengan ilmu Hermeneutik (ilmu tentang makna dan interpretasi), lagu tersebut mengisyaratkan luasnya Indonesia dengan wilayah yang terpecah belah. Namun, pencipta lagu menegaskan bahwa meskipun terpecah belah secara geografis, pada intinya kita adalah satu kesatuan secara politis dan ideologis sebagai bangsa Indonesia. Mengenai kesatuan sebuah negara, A. Hasjimi, seorang Novelis tersohor dari Aceh, menambahkan bahwa kesatuan (*unity*) mencakup kesatuan wilayah atau tanah air, kesatuan bangsa, kesatuan bahasa, doktrin kenegaraan, kesatuan sistem pertahanan, keamanan, dan kesatuan dalam lingkup kebudayaan. Terpecah belahnya sebuah wilayah tentu berdampak pada keberagaman agama, bahasa, budaya, dan hal lain yang bersifat kedaerahan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah sebuah persoalan untuk berpisah melainkan sebuah kekayaan yang harus dijaga demi keragaman budaya bangsa Indonesia seperti yang tersirat dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Nanang (2018) menjelaskan, begitu banyak karya Angkatan '45 hingga Angkatan '66 yang turut andil dalam menjaga ketahanan dan keamanan negara. Seperti yang telah penulis lansir dari media, terdapat beberapa tujuan adanya lagu-lagu perjuangan tersebut, yaitu untuk

1. menanamkan atau menumbuhkan rasa cinta tanah air;
2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. mereduksi sifat-sifat kedaerahan bangsa;
4. menghargai jasa para pahlawan;
5. menjaga perjuangan Indonesia agar tetap menyala dalam sanubari pemuda sebagai penerus bangsa; dan
6. menumbuhkan sifat rela berkorban.

### **3. Kondisi Sastra Tahun 1960-an dan Peranannya**

Lembaran sejarah Indonesia tahun 1950 sampai tahun 1966 dipenuhi dengan banyak tragedi dan kekacauan politik, khususnya kontak senjata dan ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia atau pun Indonesia dan Belanda. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia dalam kurun waktu tahun 1950-an disebabkan keinginan Inggris untuk membentuk negara boneka di Asia Tenggara melalui negara jajahannya, yaitu Malaysia. Kisruh politik ini terbawa hingga menuju “kancah” percaturan politik internasional. Indonesia yang telah tergabung sebagai anggota PBB harus keluar selama kurang lebih satu tahun karena masuknya Malaysia sebagai bagian dari PBB. Ir. Soekarno, sebagai presiden dan panglima angkatan perang, mengeluarkan sebuah semboyan yang populer pada awal paruh kedua abad XX, yaitu “Inggris kita linggis, Amerika kita setrika”. Selanjutnya, pada tahun 1960-an kisruh politik antara Indonesia dan Belanda kembali terjadi untuk yang ke sekian kalinya. Pihak Belanda tidak kunjung menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia hingga akhirnya terjadi peperangan. Tidak lama kemudian, dalam lingkungan internal Indonesia, terdapat kisruh ideologi yang menyita perhatian publik, yaitu peristiwa G30S yang salah satu motornya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Kesekian peristiwa tersebut menyisakan luka dan menimbulkan inspirasi bagi sastrawan untuk mencurahkan isi hatinya, khususnya sastrawan Angkatan '66.

Ketenteraman dan kedamaian yang tidak kunjung menetap ini memaksa sastrawan untuk berkarya sebagai bentuk implementasi dukungan kepada negara. Beberapa karya lahir pada periode ini, di antaranya, adalah “Kepada Bung Karno”



karya Edijushanan, “Pernyataan” karya Mansur Samin, “Yang Kami Minta Hanyalah” karya Taufik Ismail, dan “Catatan Harian Seorang Demonstran”. Berikut ini adalah salah satu contoh sajak Angkatan ‘66 yang menurut penulis menggambarkan keadaan pada saat itu dan memiliki makna yang mendalam.

### “Kepada Bung Karno”

Dicatat olehmu, Bung Karno  
Inilah kami!  
Yang berderap menuntut keadilan  
Tanpa mengenali lelah dan upah  
Karena kami dengar dan kami saksikan  
Tanpa dibujukdan dirayu  
Tapi kesadaran yang tumbuh membatu  
Demi suara-suiara yang membatu  
Menuntut keadilan dan kebenaran

Jangan-janga kau sebut kami  
penghianat  
Atau begundal-begundal  
keparat  
Lebih baik kau catat  
Kami adalah putra-putra  
tanah air  
Yang tiada kenal arti getir  
Karena hidup ditangan-Nya  
berakhir  
Disinipun kami berjuang  
Dengan keyakinan-Nya  
melumat

Sumber: *Kebangkitan* (Edijushanan,  
1966)

Makna mendalam dari sajak di atas memberikan arti bahwa pemuda adalah generasi bangsa dan sikap *nasionalisme* harus ada dalam diri mereka. Penulis secara implisit menyuarakan kepada penguasa negara bahwa pemuda yang bergerak kala itu bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan sebuah generasi yang cinta tanah air dan siap membela negara hingga titik darah penghabisan. Mereka pasrah karena kematian hanya berada di tangan Tuhan.

#### 4. Sastra dan Militer

Nur Haida Nuri (2013) mengatakan bahwa paham rasionalisme (mengedepankan akal) dewasa ini telah banyak berkembang akibat adanya arus globalisasi yang kian pesat. Paham yang awalnya tumbuh di Eropa ini memberikan dampak yang tidak baik bagi moral bangsa, yakni mengedepankan kekuatan akal yang dimilikinya untuk memecahkan persoalan. Sebagai contoh konkret dari paham ini adalah untuk menjaga kedaulatan negara, anggota TNI atau pun Polri yang sedang bertugas hanya dibebankan pada kewajiban, strategi, dan target. Dalam mencapai sesuatu yang mereka harapkan seharusnya mereka disuguhkan hiburan dan siraman rohani sebagai bekal semangat dan energi yang



tidak tampak. Dalam kondisi yang demikian, peran bahasa dan sastra dibutuhkan untuk memberikan pengajaran, hiburan, dan siraman semangat sebab fungsi sastra adalah rekreatif (memberikan hiburan) dan didaktif (pengajaran). Tidak berlebihan jika sastra dapat diibaratkan seperti sihir yang terus-menerus memberikan semangat magis bagi manusia. Oleh karena itu, bahasa dan sastra turut membantu angkatan militer sebagai peran utama dan masyarakat sebagai peran pendukung dalam menjaga ketahanan dan kedamaian negara sehingga kajian mengenai peran bahasa dan sastra sangatlah diperlukan.

Dalam dunia kemiliteran, konon kabarnya, pihak ABRI telah lama membaca kisah melalui sastra klasik, seperti Ramayana, Bharatayudha, dan Mahabharata. Mereka ingin mengetahui bagaimana siasat peperangan yang diterapkan pada masa itu. Selain itu, mereka mempelajari pula gelar peperangan seperti Garuda Ngalayang, Gajah Meta, dan Supit Urang. Syafrudin Usman dan Isnawati (2010) menyatakan, pembelajaran semacam ini diterapkan pada saat perebutan Irian Barat pada transisi tahun 1960-an. Dalam prosesnya, Indonesia menempuh jalur diplomasi dengan Belanda, tetapi jalur ini tidak digubris oleh pihak Belanda sehingga Indonesia mengambil sikap keras yang berujung pada konfrontasi Indonesia dengan Belanda. Thomas Stafford Raffles (2014) menyatakan bahwa sejumlah pertempuran telah terjadi, baik di darat maupun di laut. Strategi yang digunakan adalah strategi klasik yang diambil dalam cerita romantis dalam bait *Bharatayudha*, yaitu ketika para pasukan Kerajaan Astina membentuk formasi seperti udang sebagai strategi perang, yang disebut *Mongkara Boyewa*. Sardanto Tjokrowinoto (1989) menyatakan, ketika menerapkan strategi tersebut, Irian dikepung dari pusat hingga di wilayah selatan, dari pusat utara terus ke selatan seperti udang yang menangkap mangsanya. Kemudian, dari udara diterjunkan sukarelawan sebagai bentuk kepungan dari udara. Penggunaan strategi klasik semacam itu membuat pihak Belanda kewalahan sehingga “Dewi Fortuna” memihak kepada Indonesia dengan kembalinya Irian ke pangkuan Ibu Pertiwi pada tahun 1962.

##### **5. Bahasa dan Sastra Bagi Tunas Bangsa**

Keberadaan sastra bagi tunas bangsa sangat diperlukan, baik sebagai asupan intelektual maupun sebagai wawasan kebangsaan dalam korelasinya terhadap bela negara. Namun, kita harus mengetahui bagaimana metode dan strategi yang harus dilancarkan agar bahasa dan sastra dapat berguna secara maksimal bagi generasi bangsa. Untuk itu, kita harus melakukan transformasi budaya melalui karya-karya sastra melalui pengamatan terhadap pola hidup generasi bangsa abad ke-21. Generasi bangsa di era globalisasi ini dalam dunia literasi lebih giat membaca novel-novel dengan kisah romantis antartokoh yang ada di dalamnya. Tidak heran, novel dengan kisah menarik dapat membuat pembaca menangis, menjadi penasaran, bahkan sampai memburu novel kesukaannya.

Penulis memiliki pandangan bahwa dengan kondisi yang demikian, pemerintah harus memperbanyak novel-novel yang dapat menimbulkan rasa patriotis dan nasionalis bagi masyarakat. Novel tersebut paling tidak memiliki wawasan kebangsaan atau intelektualitas, tidak melulu novel romantis. Dalam sejarah, metode seperti itu pernah dilakukan oleh sastrawan Indonesia dengan menerbitkan cerita atau pun novel yang secara substansial berisi perjuangan, kepahlawanan, atau tema lain yang dapat membantu menjaga persatuan dan kesatuan negara. Sangat tepat kiranya jika dewasa ini pemerintah menerbitkan



buku bernuansa nasionalisme atau perjuangan, seperti novel *Laskar Pelangi* karya novelis terkenal, Andrea Hirata. Novel tersebut, jika kita cermati, memiliki banyak pesan moral yang ingin disampaikan sehingga selain terhibur, pembaca juga menikmati alurnya yang “cantik” dengan disuapi kisah heroik dan kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Dengan demikian, generasi muda akan “terpupuk” rasa nasionalismenya, “tersuapi” sikap bela negaranya, “terinfus” sikap perjuangannya, dan yang terakhir, sikap toleransi, kebersamaan, rela berkorban, dan persatuan generasi bangsa ini akan makin subur.

Beberapa bulan yang lalu, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan gerakan Sayembara Literasi yang menyaring penulis berbakat di Indonesia yang mampu menulis dengan tema-tema menarik. Penulis meyakini bahwa langkah-langkah demikian adalah sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk menciptakan gerakan generasi bangsa yang sadar akan arti penting persatuan dan kesatuan serta keamanan dan kedamaian melalui pesan moral yang tersirat dalam karya-karya yang telah diterbitkan. Sebagai tindak lanjutnya, kiranya dari program tersebut dapat diteruskan ke sekolah-sekolah, melalui mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia agar siswa dapat dibekali sikap bela negara dalam menjaga ketahanan dan perdamaian negara. Jika memang benar-benar diterapkan, wawasan persatuan dan kesatuan siswa tidak hanya bertambah melalui pelajaran Pendidikan Kewarganeraan (PKn) saja, tetapi juga melalui Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

## **6. Sebuah Keniscayaan**

Pada hakikatnya, banyak dampak dan kegunaan yang dapat ditimbulkan oleh bahasa dan sastra. Sebagian dari kegunaannya dapat dimanfaatkan di bidang pertahanan dan keamanan (hankam). Penulis merumuskan peran bahasa dan sastra dalam menjaga keutuhan negara sebagai berikut:

- a. membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme;
- b. menjadi bahan dalam strategi perjuangan;
- c. menjadi sarana hiburan bagi angkatan militer dan lapisan masyarakat;
- d. menjadi media untuk mengembalikan kejayaan nusantara; dan
- e. menambah wawasan kebangsaan dan sejarah.

Demikianlah peran sastra bagi pembangunan nasional sebagai sarana pertahanan dan keamanan yang sungguh nyata dalam penerapannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa dan sastra merupakan salah satu sarana untuk menjaga keutuhan sebuah negara seperti halnya sebuah pepatah “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Tidak melebihi-lebihkan jika bahasa dan sastra dalam pertahanan dan keamanan negara bagaikan sebuah “amunisi” ampuh untuk menjaga persatuan dan kesatuan.



## PENUTUP

Bagian yang paling akhir dari makalah ini penulis tutup dengan beberapa simpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diutarakan sebelumnya bahwa karya yg muncul pada periode tahun 1945—1966 merupakan karya yang berasal dari dalam diri sastrawan sebab sastrawan sebagai pencipta dari karya sastra tersebut mengalami langsung atas apa yang telah ditulisnya. Dalam lembaran sejarah, jika sastrawan berkarya dalam keadaan yang sedang ditulisnya, karya yang dihasilkan benar-benar nyata, menyentuh, dan memiliki pesan moral yang patut untuk diteladani.

Masa kemerdekaan hingga masa tumbangnya pemerintahan Orde Lama diwarnai dengan hiruk-pikuk kondisi sosial politik yang tidak stabil. Kondisi negara semacam itu turut menjadi dorongan dalam berkarya, khususnya tragedi G30S pada tahun 1965. Tragedi tersebut turut menyisakan luka yang cukup mendalam bagi bangsa Indonesia terlebih para mahasiswa sebagai tunas bangsa hingga akhirnya tergubah sebuah sajak *Catatan Harian Seorang Demonstran*. Kondisi negara sedang berada di ujung tanduk karena dijatuhkan pada dua pilihan, yaitu pihak Angkatan Darat dan pihak komunis. Banyak penyair yang mengabadikan peristiwa itu dalam bentuk karya sastra yang berwujud bait-bait puisi.

Bahasa dan sastra perlu untuk digalakkan, khususnya di kalangan para remaja. Namun, sastra yang dimaksud adalah sastra yang mampu mempertebal rasa nasionalisme dan patriotisme anak bangsa. Dengan demikian, sikap nasionalisme bangsa lebih mengakar kuat sehingga sikap menjaga kedamaian dan ketahanan negara selalu bersemi dalam diri mereka, terlebih lagi belakangan ini muncul banyak aliran atau pun tragedi yang dapat merongrong NKRI.

Bahasa dan sastra sangat berguna dalam dunia kemiliteran sebagai gardu pendukung yang menjaga ketahanan dan keamanan negara. Dalam dunia kemiliteran, salah satu peran sastra yang cukup membantu adalah strategi dan siasat perang. Pasalnya, dahulu prajurit-prajurit kita merupakan prajurit ulung yang tangguh dengan strateginya. Adakalanya kiat mengulangi kejayaan masa lampau dapat ditemukan melalui bahasa dan sastra.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adeng. (2012). “Peranan Seniman dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia”. Jurnal *Patanjala*. Vol. 4, No. 2.
- Fuadhiyah, Ucik. (2011). “Simbol dan Makna Kebangsaan dalam Lirik Lagu-Lagu Dolanan di Jawa Tengah dan Implementasinya dalam Dunia Pendidikan. Jurnal *Lingua Bahasa dan Sastra* Volume VII/1.
- Hasibuan, Sovia Rangkuti. (2005). “Peran Sastra Dan Bahasa dalam Pembangunan Bangsa, Wacana, dan Transformasi Budaya”, (Prosiding, *Seminar Nasional PESAT*, Auditorium Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Herawan, Kadek Dedy dan Sudarsana, I Ketut. (2017). “Relevansi Nilai Pendidikan Karakter dalam Geguritan Suddhamala untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia. Jurnal *Penjaminan Mutu*, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Volume 3, Nomor 2.
- Jassin, Hans Bague. (1972). *Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda*. Jakarta: Djambatan.



- Kieven, Lidia. (2017). *Menelusuri Panji di Candi-Candi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan Institut Frankais Indonesia.
- Nuri, Nur Haida. (2013). “Peranan Bahasa dalam Berkesenian: Pemberdayaan Lirik Lagu sebagai Sarana Pembentukan Karakter Bansa”, *Jurnal Arbitrer*, Vol. 1 No. 1.
- Raffles, Thomas Staford. (2014) *The History of Java*. Yogyakarta: Narasi.
- Sardanto Tjokrowinoto. (1989). “Sumbangan Kesusastraan Indonesia dalam Pembangunan Nasional”. *Pidato peresmian penerimaan guru besar di Universitas Diponegoro Semarang*.
- Saraswati, Ekarini. (2011). Pergeseran Citra Pribadi Perempuan Dalam Sastra Indonesia: Analisis Psikoanalisis Terhadap Karya Sastra Indonesia Mulai Angkatan Sebelum Perang Hingga Mutakhir. *Jurnal Artikulasi* Vol.12 No.2.
- Soebardjo, (1956). *Sari Sedjarah*, Yogyakarta: Bopkri.
- Soekono Wirjosedarmo. (tanpa tahun). *Sastra Indonesia klasik: Pengantar Kearifan Studi Sejarah Sastra*. Surabaya: Sinar Wijaya.
- Sudharmono. (1983). *30 Tahun Indonesia Merdeka: 1945—1949*. Jakarta: PT. Tira Pustaka.
- Sundoro, Mohammad Hadi. (2009). *Teka-Teki Sejarah: Menjawab Persoalan Tentang Filsafat Sejarah*. Jember; Jember University press.
- Syahrizal, dkk. (2013). “Kajian Sosiologi Sastra dan Nilai Pendidikan dalam Novel Tuan Guru Karya Salman Faris”. *Jurnal Pendidikan dan Bahasa*. Vol. 1, No. 1.
- Teeuw, A. (2015). *Sastra dan Ilmu Sastra*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Usman, Syafrudin dan Isnawati. (2010). *Pasang Surut Papua dalam Pangkuan Ibu Pertiwi*, tanpa kota: Planet Buku.
- Wellek, Rene., and Warren, Warren. (2016). *Teori Kesusastraan*. Terj. Melani Budianta. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wildan. (2010). Doktrin Nasionalisme dalam Novel A. Hasjmy. *Jurnal Bahasa dan Sastra Lingua*. Volume 5, Nomor 2.
- Zoetmulder. (1983). *Kalangwan Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*. Jakarta: Jambatan.
- Nanang. *BukuBiruku.com* (diakses pada tanggal 23 Mei 2018. Pukul 21:31 WIB)



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Pembicara : Yebqi Farhan  
Judul Makalah : Amunisi Sepatah Bait: Telaah Bahasa dan Sastra sebagai Sarana  
Ketahanan dan Keamanan Indonesia Tahun 1945—1966  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.00  
Moderator : Dr. Asrif, M.Hum.  
Pencatat : 1. Miranti Sudarmaji  
2. Mukhamdanah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Di bidang bahasa pada masa pascakemerdekaan sampai dengan tahun 1950-an banyak diciptakan lagu-lagu perjuangan oleh sastrawan Angkatan '45 dan pencipta lagu untuk membangkitkan pertahanan dan kedamaian negara.
2. Para seniman turut berjuang melalui lagu-lagu perjuangan.
3. Lembaran sejarah Indonesia tahun 1950 sampai dengan tahun 1966 dipenuhi dengan tragedi dan kekacauan politik, khususnya kontak senjata dan ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia serta Indonesia dan Belanda. Tidak lama kemudian, dalam lingkungan internal Indonesia terdapat kisruh ideologi yang menyita perhatian publik, yaitu peristiwa G-30-S yang salah satu motornya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa tersebut menyisakan luka dan menimbulkan inspirasi bagi sastrawan, khususnya sastrawan Angkatan '66, untuk mencurahkan kata hatinya.
4. Dalam ranah militer banyak hal diadopsi dari karya sastra. Dalam dunia kemiliteran, konon pihak ABRI telah lama membaca kisah klasik, seperti *Ramayana*, *Bharatayudha*, dan *Mahabharata*. Mereka ingin mengetahui bagaimana siasat peperangan yang diterapkan pada masa itu. Dari karya sastra klasik juga dipelajari gelar peperangan, seperti Garuda Ngalayang, Gajah Meta, dan Supit Urang. Pembelajaran semacam itu diterapkan pada saat perebutan Irian Barat pada transisi tahun 60-an. Strategi yang digunakan adalah strategi klasik yang diambil dari cerita romantis dalam bait *Bharatayudha*, yaitu Kerajaan Astina menggunakan strategi udang yang disebut *Mongkara Boyewa*, yaitu pasukan yang membentuk formasi seperti udang.

**Tanya Jawab**

**Penanya 1**

Nama : Amarwati

Instansi : Universitas Islam Malang

**Pertanyaan:**

Dalam kaitannya dengan sastra dan militer, setelah tahun 1966, militer sangat represif terhadap karya sastra. Apakah tindakan represif itu hanya dilakukan terhadap karya sastra saja?



**Jawaban:**

Sastra adalah dokumen sosial. Sastra yang ada pada periode tertentu merupakan gambaran kondisi sosial, budaya, dan politik saat itu.

**Penanya 2**

Nama : Putri

Instansi : Solo

**Pertanyaan:**

Militer mempunyai sejarah masing-masing. Apakah sastra yang bernuansa militer saat itu dapat mengubah waktu terjadinya Agresi Militer sampai dengan masa Orde Baru?

**Jawaban:**

Periodisasi perlu dikaji kembali sehingga dapat dipilah apa yang menjadikan sebuah karya sastra kuat pada masa sejarah 1945—1966. Apakah sastra militer bisa mengubah politik 1945—1966? Secara tidak langsung, tidak bisa. Namun, secara tidak langsung, sastra militer memiliki peran untuk menjaga kestabilan politik saat itu. Pada tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar. Oleh karena itu, sastra hadir untuk memberikan semangat. Sastra hadir untuk menghibur keduanya.

**Penanya 3**

**Pertanyaan:**

Apakah ada hubungannya dengan karya Max Havelar?

**Jawaban:**

Sistem tanam paksa banyak dihapuskan. Hal itu disebabkan oleh, salah satunya, karya sastra Max Havelar yang dikhususkan untuk meraih simpati pemerintahan Belanda.

**Isu-Isu Penting:**

1. Karya sastra tidak hanya berperan dalam bidang sosial budaya, tetapi juga dalam bidang politik dan militer. Perannya memang tidak secara langsung, tetapi secara tidak langsung. Sebagai contoh, pada tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar. Sastra hadir untuk memberikan semangat. Sastra hadir untuk menghibur keduanya. Contoh lain adalah karya *Max Havelaar* yang menyebabkan sistem tanam paksa banyak dihapuskan. Karya tersebut dikhususkan untuk meraih simpati pemerintahan Belanda.
  2. Sastra adalah dokumen sosial. Sastra yang ada pada periode tertentu menggambarkan kondisi sosial, budaya, dan politik saat itu. Karya sastra ada untuk membangkitkan semangat perjuangan.
-







## **I. SUBTEMA 9: POLITIK PERENCANAAN BAHASA DAN SASTRA**

### **1. Politik dan Perencanaan Bahasa dan Sastra**

#### **POLITIK DAN PERENCANAAN BAHASA**

**Dadang Sunendar**

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

dadangsunendar@gmail.com

#### **Abstrak**

Politik bahasa di Indonesia menetapkan tiga ranah bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Penetapan ranah ini sesuai dengan kondisi bahasa yang hidup di bumi Indonesia. Dalam satu dekade penetapan ketiga ranah bahasa tersebut, hampir tidak ada resistansi terhadap pengaturan ketiga ranah bahasa yang sekaligus memperlihatkan urutan prioritasnya. Daya hidup ketiga ranah bahasa bisa dikatakan baik meskipun ranah bahasa asing mencoba menyeruak melewati dua ranah sebelumnya, terutama di ruang publik. Hal itu menjadi tantangan terbesar dalam penegakan peraturan perundang-undangan bahasa di tanah air. Ketiadaan sanksi dan denda dalam Undang-Undang Bahasa seharusnya tidak boleh menjadi alasan pengingkaran penggunaan bahasa negara karena fungsi bahasa negara sudah jelas, yaitu sebagai pengungkap jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, dan sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Kongres Bahasa Indonesia XI harus menjadi momentum evaluasi satu dekade implementasi UU Bahasa untuk mengungkap sikap masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pemanfaatan dan perlindungan bahasa daerah, serta bahasa asing.

**Kata-kata kunci:** politik bahasa, Undang-Undang Bahasa, bahasa negara

#### **PENGANTAR**

Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan momentum yang amat penting bagi bangsa Indonesia karena menghasilkan tiga sumpah yang menyatukan suara hati bangsa, yaitu berbangsa satu, bangsa Indonesia; bertanah air satu, Tanah Air Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah terbukti mampu menyatukan rakyat di seluruh negeri, menjadi roh kolektif bangsa, dan perekat utama kebinekaan Indonesia sejak Sumpah Pemuda menuju masa kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan sampai dengan pascakemerdekaan yang sudah melewati usia 73 tahun.

Setiap negara memiliki kondisi bahasa yang berbeda karena banyak faktor. Di satu sisi, negara yang memiliki latar belakang sejarah kolonialisme dihadapkan pada kenyataan hidupnya bahasa kaum kolonial sebagai konsekuensi kehadiran mereka. Di negara seperti itu pada umumnya bahasa resminya adalah bahasa setempat sebagai wujud independensi dan nasionalisme yang ditunjukkan sebagai representasi jati diri bangsa pascakemerdekaan. Bangsa Indonesia yang lebih dari 350 tahun dijajah oleh Belanda memang tidak sama seperti negara-negara lain yang menjadikan bahasa kolonial sebagai bahasa kedua. Bangsa Indonesia hanya menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa asing. Di sisi lain, ada pula negara yang ditakdirkan memiliki banyak bahasa karena jumlah suku bangsanya dan



Indonesia termasuk pada kriteria negara seperti ini. Sebagai bangsa yang memiliki banyak bahasa, Indonesia memerlukan perencanaan bahasa yang baik.

### **POLITIK BAHASA DAN SATU DEKADE UNDANG-UNDANG BAHASA**

Politik bahasa adalah perencanaan bahasa. Ferguson (2006) mengatakan bahwa perencanaan bahasa dilaksanakan untuk mencari solusi atas masalah bahasa. Perencanaan bahasa biasanya dilakukan pada level nasional. Artinya, undang-undang kebahasaan dan turunannya harus berperan untuk semua persoalan bahasa.

Politik bahasa di Indonesia menetapkan tiga ranah bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Penetapan ranah ini sesuai dengan kondisi bahasa yang hidup di bumi Indonesia. Dalam satu dekade penetapan ketiga ranah bahasa tersebut, hampir tidak ada resistansi terhadap pengaturan ketiga ranah bahasa yang sekaligus memperlihatkan urutan prioritasnya. Daya hidup ketiga ranah bahasa bisa dikatakan baik meskipun ranah bahasa asing mencoba menyeruak melewati dua ranah sebelumnya, terutama di ruang publik. Hal itu menjadi tantangan terbesar dalam penegakan peraturan perundang-undangan bahasa di tanah air.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya pasal 25 sampai dengan 45 merupakan rujukan sah politik bahasa dan sastra di Indonesia yang mencoba mengakomodasi kondisi kebahasaan dan kesastraan. Menyongsong satu dekade implementasi undang-undang ini tentu saja banyak hal yang dapat kita diskusikan di antaranya, tentang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra, perlindungan bahasa dan sastra, serta penegakan kebijakan bahasa.

Pengembangan bahasa Indonesia terus dilakukan melalui beragam strategi, mulai dari penambahan lema, makna, submakna, penelitian, pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa, penyusunan bahan ajar, penyusunan alat uji kemahiran berbahasa, penerjemahan, dan lain-lain. Abad XXI ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi yang turut mewarnai pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Peluncuran KBBI V daring dan luring memberikan banyak kemudahan kepada banyak pihak untuk lebih mudah mengakses informasi kebahasaan; para pengguna telepon seluler dapat mencari makna kosakata dengan mengunduhnya setiap waktu. Masyarakat yang masih kesulitan mengakses secara daring dapat memanfaatkan KBBI luring yang sederhana dan dapat dibawa ke mana-mana. Aplikasi-aplikasi yang ditawarkan seakan menjadikan semua pengguna menjadi seorang pekamus karena mereka dapat mengusulkan atau mengkritisi sebuah makna.

Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam pengembangan bahasa bisa dikatakan telah dilaksanakan meskipun masih banyak catatan untuk pengembangannya. Catatan utama diberikan pada penegakan aturan yang berlaku dan mengikat masyarakat tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Undang-undang itu sudah dilaksanakan selama hampir 10 tahun, tetapi hal itu belum mampu mengubah persepsi sebagian masyarakat untuk lebih bangga menggunakan bahasa negara. Ukuran paling mudah yang dilakukan adalah dengan memotret ruang publik; ruang yang menjadi milik seluruh warga, ruang tempat pembuktian keperkasaan sebuah simbol bangsa, yaitu bahasa Indonesia.



Ketiadaan sanksi dan denda dalam Undang-Undang Bahasa seharusnya tidak boleh menjadi alasan pengingkaran penggunaan bahasa negara karena fungsi bahasa negara sudah jelas, yaitu sebagai pengungkap jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, dan sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Kesadaran dan kebanggaan terhadap simbol negara harus mendahului aturan yang mengikutinya. Tentu saja hal ini berbeda bila kita membandingkannya dengan hal lain yang peringkatnya tidak sama dengan simbol negara. Salah satu fenomena yang hidup di sebuah negara berkembang tampak pada sebagian masyarakatnya yang dengan mudah berkelit dari sebuah kewajiban meskipun kewajiban itu nyata dan hadir, serta mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, jika sanksi dan denda itu pun ada, tidak ada jaminan bahwa semua permasalahan akan diatasi, terlebih bila sanksi dan denda hanya berupa sanksi administratif.

Pembinaan bahasa menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengembangan yang dilakukan. Pemasayarakatan dan penyuluhan bahasa, pelajaran dan perkuliahan bahasa Indonesia, baik sebagai mata kuliah umum, mata kuliah utama, maupun jenis pembinaan lainnya menggambarkan riuhnya masyarakat belajar bahasa Indonesia. Muara dari hasil pembelajaran itu salah satunya harus tergambar dalam ruang-ruang masyarakat yang disebut ruang publik. Ruang publik yang masih dipenuhi penggunaan bahasa yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah potret sepuluh tahun pemberlakuan peraturan perundangan ini. Kedaulatan bahasa negara belum sepenuhnya berjaya di rumahnya sendiri.

Oleh karena itu, Kongres Bahasa Indonesia XI harus menjadi momentum evaluasi satu dekade implementasi UU Bahasa untuk mengungkap sikap masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pemanfaatan dan perlindungan bahasa daerah, serta bahasa asing.

## **PERENCANAAN BAHASA**

Kaplan dan Baldauf Jr. (1997) mengatakan bahwa usia perencanaan bahasa kemungkinan sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Mereka menyebut perencanaan bahasa sebagai sebuah batang tubuh pemikiran, perundang-undangan dan regulasi, aturan-aturan perubahan, keyakinan, dan praktik yang ditujukan untuk mencapai perubahan yang direncanakan dalam penggunaan bahasa oleh seseorang atau komunitas. Perencanaan bahasa dan sastra Indonesia dilakukan melalui berbagai proses pengembangan untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Penelitian kebahasaan, pengayaan kosakata, pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa, penyusunan bahan ajar dan uji kemahiran berbahasa, penerjemahan, dan publikasi merupakan langkah-langkah pengembangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perencanaan bahasa Indonesia. Hal yang sama untuk sastra Indonesia dilakukan untuk menegaskan kekayaan budaya dan pengungkap budaya daerah serta memperkuat posisi sastra Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sastra dunia.

Perencanaan bahasa Indonesia tidak terlepas dari konteks upaya peningkatan literasi masyarakat. Narasi literasi yang bergemuruh di tanah air menyusul informasi tentang masih belum kuatnya minat baca masyarakat memperoleh dukungan langsung melalui penguasaan bahasa sebagai elemen utama literasi.



Pendidikan dan literasi menjadi dua fondasi dalam satu tarikan napas yang sama. Pengembangan bahasa Indonesia pada intinya harus mempermudah akses masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dan kecakapan diri. Literasi dan subliterasi lainnya perlu memperoleh jembatan pemahaman melalui kosakata yang tersedia.

Politik bahasa dalam sektor pendidikan memberi peran dan kedudukan istimewa pada bahasa Indonesia. Keistimewaan kedudukan bahasa Indonesia yang tidak terbantahkan sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi masih memerlukan perencanaan yang matang dalam praktik pembelajarannya. Fungsi dan tujuan pengajaran bahasa Indonesia di setiap jenjang tentu memiliki konsekuensi perencanaan yang baik untuk mengimbangi privilese yang sudah diberikan.

Perencanaan bahasa dan sastra daerah pada pokoknya memberikan tempat yang penting bagi bahasa-bahasa daerah di tanah air yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia dan sebagai elemen utama kebinekaan bangsa. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kewajiban negara untuk memelihara dan melindungi bahasa daerah. Pemertahanan bahasa daerah dapat dilihat dari jumlah penutur muda bahasa ibu. Pewarisan bahasa ibu dari orang tua kepada anak-anaknya di ruang keluarga, implementasi muatan lokal, dan ruang komunitas untuk wilayah-wilayah tertentu yang memiliki banyak bahasa daerah harus memperoleh pengawalan yang ketat dari pemerintah daerah sebagai pemegang kewajiban pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.

Pelindungan bahasa daerah dapat terwujud apabila pemerintah (daerah) memberikan sikap positif kepada masyarakat (baca: keluarga) melalui berbagai fasilitasi penggunaan bahasa daerah. Pewarisan bahasa daerah dari para orang tua kepada anak-anak bisa terwujud secara alamiah bila kondusivitas bahasa daerah sudah terjaga. Penciptaan suasana kondusif harus diberlakukan juga untuk sastra daerah. Penerbitan buku-buku berbahasa daerah oleh pemerintah daerah akan mampu menjaga pemertahanan bahasa dan sastra di daerah.

Keberadaan bahasa asing di tanah air secara resmi diakui melalui proses belajar di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Perubahan beberapa kurikulum memengaruhi posisi bahasa asing. Jumlah jam belajar yang belum memadai dan sumber belajar yang masih terbatas sering kali menjadi catatan pengajaran bahasa asing di sekolah menengah. Bertambah atau berkurangnya peserta didik yang belajar bahasa asing masih banyak ditentukan oleh kebijakan pimpinan sekolah dan kecakapan guru pengajar di sekolah. Di sisi lain, jumlah lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang lebih banyak dibandingkan dengan lowongan pekerjaan sebagai pengajar bahasa asing menyebabkan banyaknya lulusan di bidang ini memilih bekerja di luar bidangnya. Padahal, tujuan pemerintah memfasilitasi pengajaran bahasa asing adalah untuk memberikan kompetensi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. Artinya, para peserta didik disiapkan sejak dini di sekolah menengah dan melanjutkan pendidikannya dengan lebih intensif jika mereka memilih profesi masa depan sebagai pengajar atau ahli dalam bahasa asing tertentu. Aspek perencanaan memerlukan kajian lebih lanjut mengingat kompleksitas jumlah tenaga yang tersedia dengan lapangan pekerjaan yang masih terbatas.



Terbukanya pasar ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus memaksa kita mengubah perencanaan bahasa asing. Penguasaan bahasa anggota ASEAN menjadi pertimbangan kebijakan ekonomi yang terbuka. Bahasa Indonesia, di samping bahasa Inggris, terus mengupayakan dirinya menjadi salah satu bahasa komunikasi di ASEAN, sebagai bahasa yang paling dominan dipakai dari segi jumlah penutur, potensi, dan juga politik kebahasaan yang telah digariskan. Peluasan diplomasi bahasa negara ke seluruh dunia juga harus diikuti oleh berbagai upaya penguasaan beberapa bahasa asing, termasuk bahasa yang ada di ASEAN.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ferguson, Gibson. (2006). *Language planning and education*. Edinburg: Edinburg University Press Ltd.
- Kaplan, Robert B, Baldauf Jr., Richard B. (1997). *Language planning: from practice to theory*. Clevedon, Philadelphia, Toronto, Sydney, Johannesburg: Multilingual Matters Ltd.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014. (2014). *Pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. (2009). *Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan*.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Gelar Wicara V**

Pembicara : Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.  
Judul Makalah: “Politik dan Perencanaan Bahasa di Indonesia”  
Hari, tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 10.15—11.15  
Moderator : Prof. Emi Emilia, M.Ed., Ph.D.  
Pencatat : 1. Dewi Nastiti  
2. Triwulandari  
3. Nikita Daning Pratami

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Semua tema dalam Kongres Bahasa Indonesia XI merupakan perencanaan bahasa yang merupakan implementasi dari politik bahasa.
2. Pengajaran bahasa Indonesia pada semua jenjang pendidikan sangat penting secara filosofis dan fundamental.
3. Dasar hukum penggunaan bahasa Indonesia:
  - a. UUD 45
  - b. UU Nomor 24 Tahun 2009
  - c. PP Nomor 57 Tahun 2014
  - d. Perpres Nomor 16 Tahun 2010
  - e. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016
  - f. Permendikbud Nomor 27 Tahun 2017
4. Peraturan tentang bahasa Indonesia seharusnya menjadi rujukan skripsi, tesis, dan disertasi (terutama mengenai bahasa) agar peraturan dan undang-undang negara tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas.
5. Penggunaan bahasa Indonesia akan diatur sendiri dalam peraturan presiden yang saat ini sedang dirumuskan. Peraturan presiden yang di dalamnya terdapat sanksi dan denda itu diharapkan akan menjadi rujukan pemda di seluruh Indonesia dalam mengatur penggunaan bahasa Indonesia di daerah.
6. Tiga isu kebahasaan yang regulasinya telah jelas diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 adalah sebagai berikut.
  - a. Bahasa Indonesia dan penggunaannya sebagai bahasa negara, identitas bangsa dan penginternasionalan bahasa Indonesia dalam pergaulan sosial;
  - b. Bahasa daerah yang beragam dan menjadi identitas kedaerahan di tengah ancaman kepunahan dan upaya pelestariannya; dan
  - c. Bahasa asing dan pemakaiannya oleh masyarakat di tengah upaya pengutamaan bahasa Indonesia.
7. Memahami bahasa dan sastra sama dengan memahami masyarakat dan budayanya serta perubahan lingkungan sekitar.
8. Teknologi dapat mereduksi penggunaan bahasa daerah. Hal itu tidak mustahil dapat juga terjadi terhadap bahasa Indonesia.
9. Berikut tantangan dan potensi pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa di Indonesia.



- a. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan tiga zona waktu yang rentangnya setara dari Britania Raya di titik barat hingga ke Yunani di titik timur.
  - b. Indonesia memiliki suku bangsa terbanyak di dunia.
  - c. Indonesia memiliki keragaman bahasa dan budaya yang didukung oleh keragaman sumber daya alam yang melimpah.
10. Universitas Cendrawasih akan menyusun sebuah proposal ke Kemenristekdikti untuk membuat program studi bahasa daerah.
11. Perencanaan bahasa tidak dapat dilepaskan dari perencanaan bahasa daerah.
12. Potensi bahasa dan sastra dalam pemajuan pendidikan dan kebudayaan:
- a. Bahasa dan sastra mencerminkan keberagaman pola pikir dan pengetahuan masyarakat Indonesia serta keberagaman pola hidup masyarakat Indonesia.
  - b. Perencanaan bahasa daerah yang efektif hanya dapat dilakukan oleh orang tua saja, yakni melalui pewarisan. Untuk itu, Badan Bahasa mengimbau kepada para orang tua untuk mewariskan bahasa ibu kepada anak cucunya.
13. Alasan perencanaan bahasa dan sastra
- a. Setiap tahun bahasa dan sastra terancam punah atau mengalami penurunan status.
  - b. Bahasa dan sastra bukan sekadar sekumpulan kata atau seperangkat kaidah tata bahasa, melainkan khazanah berbagai refleksi pemikiran dan pengetahuan.
  - c. Kehilangan bahasa dan sastra berarti kehilangan daya kreativitas dan keberagaman intelektualitas sebagai realisasi kemanusiaan.
  - d. Kepunahan bahasa dan sastra berarti kematian batin.
14. Yang mengetahui kondisi bahasa daerah adalah para peneliti bahasa. Oleh karena itu, para peneliti itu harus terus memetakan kondisi bahasa daerah. Saat ini, sementara, jumlah bahasa daerah yang sudah terpetakan sebanyak 668 bahasa.

## **Tanya Jawab**

### **Penanya 1**

Nama : Imam

Instansi : Universitas Negeri Semarang

### **Pertanyaan:**

Apakah sudah ada program percepatan kerja sama, antara Badan Bahasa dan perguruan tinggi, untuk pelaksanaan UKBI?

### **Jawaban:**

Jika melihat pelaksanaan UKBI dalam lima tahun terakhir, peserta UKBI masih didominasi oleh warga negara Indonesia. Artinya, masih berbanding terbalik dengan negara lain, misalnya Inggris. Warga negara asing dalam dua tahun terakhir yang telah melaksanakan UKBI di balai dan kantor bahasa sekitar 350 orang. Kerja sama antara Badan Bahasa dengan lembaga lain masih dikaji, misalnya perguruan tinggi. Hal itu sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2016 terkait dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).





**Penanya 2**

Nama : Meina Huda

Instansi : -

**Pertanyaan:**

Apakah ada upaya konkret Badan Bahasa terkait dengan produksi buku berbahasa daerah?

**Jawaban:**

Penerbitan buku bahasa daerah harus menjadi strategi perencanaan bahasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Peran Badan Bahasa yang sudah dilakukan antara lain membuat kamus bahasa daerah, pelatihan bahasa daerah, dan penerjemahan bahasa daerah, serta bekerja sama dengan Yayasan Rancage terkait dengan produksi buku berbahasa daerah. Pengajaran bahasa daerah sebagai bahasa kedua (di sekolah) sulit untuk berhasil. Pola pendidikan bahasa daerah di Indonesia, yaitu melalui pelajaran muatan lokal (mulok), dapat diteruskan, tetapi Badan Bahasa mengusulkan pola Pendidikan bahasa daerah melalui komunitas.

**Penanya 3**

Nama : Kishor Kumar Das

Instansi : Pengajar BIPA di India

**Pertanyaan:**

Bagaimana cara menampilkan bahasa yang lebih efisien dalam media sosial dan media massa?

**Jawaban:**

Usaha penggunaan bahasa yang lebih efisien tetap harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia dari segi struktur kalimat dan sebagainya.

**Isu-Isu Penting:**

1. Pewarisan bahasa daerah oleh orang tua kepada anak cucu merupakan hal penting karena merupakan salah satu strategi jitu dalam perencanaan bahasa.
2. Kata kunci dalam perencanaan bahasa daerah adalah perlindungan: melindungi bahasa yang terancam punah.
3. Regulasi yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia perlu terus dimasyarakatkan.
4. Pengupayaan regulasi bahasa yang lebih kuat terus dilakukan oleh Badan Bahasa.



## 2. Masyarakat Multilingual dan Kebijakan Bahasa di Indonesia

### MASYARAKAT MULTILINGUAL DAN KEBIJAKAN BAHASA DI INDONESIA

*Multilingual Society and Language Policy in Indonesia*

**Mikihiro Moriyama**

Nanzan University

moriyama@nanzan-u.ac.jp

#### **Abstrak**

Indonesia berhasil untuk mengukuhkan bahasa nasional setelah kemerdekaan dengan suatu kebijakan bahasa. Hal ini bukan hal yang mudah dan wajar tanpa usaha dan perjuangan dengan pemikiran tertentu apabila kita menimbang Indonesia pernah berada di bawah penjajahan lebih dari seratus tahun. Bahasa nasional itu dipilih dan diperjuangkan oleh bangsa baru sampai dijadikan pijakan yang kuat untuk negara merdeka. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, bahasa administrasi, dan bahasa komunikasi di masyarakat yang majemuk dengan suku bangsa dan etnis. Kebijakan bahasa di Indonesia bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat monoglossia. Satu bahasa yang dipilih dan dikembangkan demi keberhasilan solidaritas masyarakat dari segi politik. Dari segi ekonomi bahasa sangat efisien dan efektif apabila negara mempunyai satu bahasa nasional dan administrasi. Baik pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru sama-sama menerapkan kebijakan berbahasa satu tanpa ragu, yaitu Bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa untuk digunakan di wilayah Republik Indonesia. Makalah ini pertama-tama mencoba menelusuri keadaan pemakaian bahasa di masyarakat dari zaman Hindia Belanda sampai dengan abad ke-21. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat poliglossia, juga masyarakat yang terdiri atas orang-orang multilingual pada setiap zaman, baik zaman Hindia Belanda maupun masa setelah kemerdekaan. Dalam pembahasan ini daerah Jawa Barat yang dihuni oleh orang Sunda diambil sebagai contoh supaya tergambar situasi kebahasaan dari zaman ke zaman. Dengan singkat makalah ini akan membahas bagaimana Indonesia berhasil menciptakan masyarakat multilingual, bukan masyarakat monolingual, tanpa kekacauan. Berdasarkan sejarah kebahasaan ini akan dibahas wujud proporsi bahasa yang lebih baik antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing untuk abad ke-21.

**Kata-kata kunci:** kebijakan bahasa, masyarakat multilingual, bahasa daerah, zaman Hindia Belanda

#### **Abstract**

*Indonesia has achieved a great deal in promoting and encouraging the spread of its national language since independence. The national language has played a significant role in uniting a diverse number of ethnic groups, each with their own language and culture. In the history of this process governments, both in the Dutch colonial period and after independence, created and implemented a language policy with different purposes. Malay in colonial times and Bahasa Indonesia or Indonesian in the independent nation was selected respectively as*



*the communication language and official language of the nation. The language chosen was neither the colonials' language nor the language of majority in the nation. The other ethnic languages of the archipelago were placed in a supplemental position. As a result, Indonesia has managed to promote the use of a single national language in the years since independence without subjecting the nation to linguistic irresolution and confusion. Interestingly, however, Indonesia has not become a monolingual society: what has emerged, instead, is a nation of multilingual peoples. This paper will briefly consider how multilingual societies have been formed in Indonesia over the course of twentieth century, and will then turn to explore how in particular, language policy has affected the language use of Sundanese society in West Java as an example. It will further be proposed that Indonesia has always been home to a particularly rich and diverse blend of multilingual peoples and cultures—an element which looks very much set to continue into this 21<sup>st</sup> century. Finally, this paper will attempt to outline a possible configuration of languages and societies in the Indonesia of the future.*

**Keywords:** *language policy, multilingual, regional language, Dutch colonial period*

## **PENDAHULUAN<sup>1</sup>**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cukup unik dari segi bahasa.<sup>2</sup> Bagaimana keadaan bahasa yang unik itu terbentuk dan berkembang dalam sejarah? Dapat dikatakan bahwa Indonesia berhasil mengukuhkan bahasa nasional setelah kemerdekaan dengan suatu kebijakan bahasa. Sebetulnya, Hal ini bukan hal yang mudah dan wajar. Harus ada usaha dan perjuangan dengan pemikiran tertentu apalagi kita menimbang Indonesia pernah berada di bawah penjajahan lebih dari seratus tahun. Dalam hal ini, lebih terasa kalau dibandingkan dengan negara-negara yang pernah dijajah di Afrika, Amerika Latin, dan tempat lain di dunia. Bahasa nasional itu dipilih dan diperjuangkan oleh bangsa baru sampai dijadikan pijakan yang kuat untuk negara merdeka.

Sekali lagi Indonesia berhasil menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945, Pasal 36. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, bahasa administrasi, dan bahasa komunikasi di masyarakat yang majemuk dengan suku bangsa dan etnis. Dapat dikatakan bahwa kebijakan bahasa di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat monoglossia. Satu bahasa yang dipilih dan dikembangkan demi keberhasilan solidaritas masyarakat dari segi politik. Dari segi ekonomi bahasa sangat efisien dan efektif apabila negara mempunyai satu bahasa nasional dan administrasi. Baik pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru sama-sama menerapkan kebijakan berbahasa satu tanpa ragu, yaitu bahasa Indonesialah yang satu-satunya bahasa untuk digunakan di wilayah Republik Indonesia.

Meskipun demikian, apakah bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia sudah hilang dan tidak dipakai sama sekali di tengah masyarakat? Tentu, tidak begitu

---

<sup>1</sup> Makalah ini ditulis untuk Kongres Bahasa Indonesia XI yang akan dilaksanakan pada tanggal 28–30 Oktober 2018 di Jakarta, Indonesia. Penelitian ini sebagian dibantu dana dari Nanzan University Pache Research Subsidy I-A-2 for 2019. Pembahasan makalah ini pembahasan lanjutan dari makalah sebelumnya (Moriyama 2015a). Oleh karena itu, sebagian pembahasan bertumpang tindih dengan makalah tersebut.

<sup>2</sup> Saya ucapkan banyak terima kasih atas komentar terhadap makalah ini dan koreksi bahasa Indonesia kepada Dr. Hawe Setiawan, Universitas Pasundan di Bandung.



kenyataannya. Wilayah Nusantara mempunyai banyak bahasa sejak lama dan masih dimanfaatkan, dan berbagai bahasa asing juga dipakai sejak lama. Makalah ini pertama-tama mencoba menelusuri keadaan pemakaian bahasa di tengah masyarakat dari zaman Hindia Belanda sampai dengan abad ke-21 untuk mencari jawaban atas pertanyaan sebagai berikut: bagaimanakah kebijakan bahasa pada zaman Hindia Belanda? Bagaimana orang memakai bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada zaman Hindia Belanda, setelah kemerdekaan, dan zaman globalisasi ini? Apakah semua orang Indonesia adalah monolingual dari zaman ke zaman? Dalam pembahasan ini daerah Jawa Barat yang dihuni oleh orang Sunda diambil sebagai contoh supaya tergambar situasi kebahasaan dari zaman ke zaman. Dengan singkat makalah ini akan membahas bagaimana Indonesia berhasil menciptakan masyarakat multilingual, bukan masyarakat monolingual, tanpa menimbulkan kekacauan.

Makalah ini akan menelusuri sejarah singkat keadaan kebahasaan dalam masyarakat Indonesia untuk memikirkan subtopik “Proporsi Peran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Asing”, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat poliglossia, juga masyarakat yang terdiri atas orang multilingual pada setiap zaman, baik zaman Hindia Belanda maupun masa setelah kemerdekaan. Berdasarkan sejarah kebahasaan ini akan dibahas wujud proporsi bahasa yang lebih baik antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing untuk abad ke-21 ini.

### **1. Masyarakat Poliglossia pada Zaman Hindia Belanda**

Di wilayah Nusantara yang sangat luas terdapat banyak bahasa di tengah masyarakat. Pada zaman Hindia Belanda penjajah menyadari hal itu dan mencoba menerapkan berbagai kebijakan mengenai bahasa. Tujuan utama bagi pemerintah kolonial adalah manajemen yang efisien supaya mendapat keuntungan yang lebih besar demi kemakmuran *vaderland*, yaitu negeri Belanda. Untuk tujuan ini dirasakan perlunya ada pendidikan untuk membina orang pribumi sebagai *ambtenaar* atau pegawai negeri, dan sistem pendidikan Barat diperkenalkan kepada masyarakat tradisional pada pertengahan abad ke-19. Bahasa yang dipakai untuk sekolah Belanda bukanlah bahasa penjajah, bahasa Belanda, melainkan bahasa-bahasa lokal yaitu bahasa Jawa, Sunda, Melayu, dan lain-lain pada sekolah dasar, khususnya untuk mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Kebijakan ini berlainan dengan kebijakan yang diterapkan di tanah-tanah jajahan di Afrika atau Amerika Latin. Pemerintah kolonial Belanda secara konsisten memakai bahasa lokal untuk pendidikan pribumi.

Pada jenjang pendidikan yang lebih atas, dan untuk mata pelajaran yang lain seperti ilmu bumi dan ilmu alam pada sekolah dasar, diajarkan dengan bahasa Melayu karena disadari bahwa bahasa Melayu sudah lama digunakan sebagai bahasa komunikasi di antara orang-orang pribumi di wilayah Hindia Belanda, juga digunakan oleh kalangan lain seperti orang Indo dan peranakan, orang Arab, orang China, dan etnis lain. Bahasa Melayu juga berperan sebagai bahasa komunikasi antarbangsa. Pemerintah Hindia Belanda membuat bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan bahasa administrasi kedua setelah bahasa Belanda. Mereka juga mengupayakan standardisasi bahasa Melayu supaya bahasa itu dijadikan bahasa komunikasi dan bahasa pendidikan. Pada tahun 1872 bahasa Melayu yang dipakai di Melaka dan Riau diangkat sebagai bahasa Melayu



standar, dan pada tahun 1901 Ejaan Bahasa Melayu pun distandardisasi dengan terbitnya *Kitab Logat Melajoe* oleh Ch. A. van Ophuijsen.<sup>3</sup>

Bisa dikatakan ada semacam piramida bahasa, yaitu di tingkat paling atas ada bahasa Belanda, lapisan kedua adalah bahasa Melayu, dan lapisan yang paling bawah adalah bahasa-bahasa suku bangsa. Piramida ini sejajar dengan hierarki sosial pada masa itu. Kaum penjajah memakai bahasa Belanda, kaum elite pribumi berkomunikasi dengan penjajah dan sesama elite pribumi dalam bahasa Belanda, sedangkan dengan pribumi bawahannya dalam bahasa Melayu, *ambtenaar* rendah atau pegawai pemerintah kelas bawah dan rakyat memakai bahasa suku bangsa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan bahasa Bali. Sungguh banyak bahasa pada masyarakat kolonial.

Cukup menarik kalau kita melihat bagaimana seorang bangsawan belajar dan menguasai bahasa untuk memahami keadaan poliglossia di tengah masyarakat pada masa Hindia Belanda. Raden Ahmad Djajadiningrat lahir di sebuah desa dekat Pandeglang sebagai anak *regent* Lebak di Residensi Banten pada tahun 1877 (Djajadiningrat, 1936). Keluarga Djajadiningrat adalah keluarga terpandang, dan dia sendiri menjadi gubernur Batavia dan anggota *Volksraad* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Bahasa ibunya adalah bahasa Sunda di tengah masyarakat desa kelahirannya, juga bahasa Jawa dari ibunya yang berasal dari daerah utara Residensi Banten. Mungkin juga dia diajari aksara Jawa oleh ibunya sebagai salah satu pengetahuan budaya *ménak* pada masa itu. Memang, buku-buku berbahasa Sunda juga sempat dicetak dengan huruf Jawa oleh pemerintah kolonial (Moriyama, 2005: 90—92). Kaum elite di Pulau Jawa harus bisa membaca dan menulis dalam bahasa Jawa sampai dengan awal abad ke-20.

Bahasa pertama yang dipelajari oleh Ahmad kecil, sebagaimana lazimnya anak Muslim, adalah bahasa Arab. Dia pergi ke pesantren untuk mengaji dan belajar huruf Arab dan pelafalan bahasa Arab. Ayah Ahmad menyuruhnya belajar aksara Latin<sup>4</sup> kepada pegawai bawahannya sebelum masuk sekolah Belanda supaya Ahmad tidak ketinggalan pelajarannya nanti. Ahmad mengenang, “Dalam beberapa minggu saja saya bisa membaca dan bisa menulis baik dengan potlot [dalam huruf Latin]” (*Na eenige weken kon ik vrij behoorlijk lezen en vrij netjes met potlot schrijven*) (Djajadiningrat, 1936: 24). Buku-buku yang dicetak pada masa itu semakin lama semakin banyak dalam huruf Latin. Kebanyakan buku sekolah pada abad ke-19 dicetak dan diterbitkan oleh *Landsdrukkerij* atau Percetakan Pemerintah (Moriyama, 2005: 79—87). Setelah datang waktunya, Ahmad masuk sekolah sistem Belanda yang didirikan oleh pamannya, dan mulai belajar bahasa Melayu serta bahasa Belanda. Semakin tinggi kelas dan pelajarannya di sekolah itu, proporsi bahasa Belanda semakin banyak. Ketika dia masuk sekolah Belanda (H.B.S. atau *Hogereburgerschool*) untuk 5 tahun, bahasa pengantarnya menjadi bahasa Belanda dan dia belajar bersama-sama dengan remaja Belanda. Dengan demikian, setidaknya, Ahmad bisa membaca 3 aksara,

---

<sup>3</sup> Pemerintah Hindia Belanda menetapkan bahasa standar untuk bahasa Jawa, bahasa Sunda, selain bahasa Melayu pada tahun yang sama. Bahasa Jawa yang dipakai di Surakarta dan bahasa Sunda di Bandung masing-masing ditetapkan sebagai bahasa standar (Moriyama, 2005: 23).

<sup>4</sup> Aksara Latin pada mulanya disebut aksara Belanda.



yaitu Arab, Jawa, dan Latin serta menguasai 4 bahasa, yaitu Sunda, Jawa, Melayu, dan Belanda.<sup>5</sup>

Contoh di atas memang hanya menyangkut seorang elite pada zaman kolonial saja, tetapi mencerminkan betapa banyaknya bahasa di dalam kehidupan masyarakat. Orangnyanya benar-benar multilingual dan masyarakatnya poliglossia. Paling tidak bahasa pemerintahan adalah bahasa Belanda dan bahasa Melayu di kalangan kaum atas ditambah bahasa daerah di kalangan kaum bawah. Dengan kata lain, pada masa Hindia Belanda situasi kebahasaan bersifat multilingual secara vertikal dan poliglossia secara horisontal. Namun, bahasa Melayulah yang menjadi lebih penting dalam masyarakat baik secara vertikal maupun secara horisontal. Ahmad Djajadiningrat menyadari hal itu, dan pernah mengajukan usul bersama rekan Belandanya supaya bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa resmi bersama bahasa Belanda di *Volksraad*.<sup>6</sup> Usulnya disetujui oleh sidang dengan pemungutan suara setelah perdebatan sengit, dan kejadian ini sangat berarti dalam pergerakan nasionalisme pada masa setelahnya.

Saat itu, masyarakat awam pada umumnya monolingual<sup>7</sup>. Mereka berbahasa daerah dan tidak mampu memakai bahasa Melayu yang semakin menjadi penting dalam masyarakat dengan nama baru Bahasa Indonesia (Moriyama, 2005: 24—30). Sekolah-sekolah mengajarkan bahasa Melayu dan memakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk mata pelajaran. Namun, pemerintah kolonial tetap berupaya mempertahankan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya yang ada kaitannya dengan identitas setiap etnis. Bahasa Belanda tidak dijadikan bahasa komunikasi karena mereka menganggap bahasa Belanda terlalu sulit untuk rakyat jajahan dan makan biaya banyak. Kebijakan bahasa ini diterapkan dan dikembangkan melalui pendirian *Commissie voor de Inlandsche School- en Volkslectuur* atau Komisi untuk Buku-buku Sekolah Bumiputra dan Buku-buku Bacaan Rakyat pada 1908 yang kemudian dijadikan Balai Poestaka pada tahun 1917.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan bahasa ini membutuhkan anggaran yang cukup besar bagi pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Sekali lagi kebijakan ini berbeda dengan negara jajahan yang lain. Maier menilai kebijakan bahasa yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu tidak berhasil karena tidak konsisten dengan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi di seluruh wilayah jajahannya (Maier, 1993: 56—57). Dengan kata lain, kebijakannya setengah-setengah, yakni tidak menetapkan satu bahasa untuk koloninya. Bersama bahasa Melayu terdapat bahasa Belanda dan bahasa suku bangsa di setiap daerah. Timbullah masyarakat poliglossia.

---

<sup>5</sup> Sangat mungkin Ahmad belajar bahasa Latin dan bahasa Inggris di H.B.S., sedangkan bahasa Arabnya mungkin dikuasai sebagai bahasa Agama, yaitu untuk memahami ayat-ayat Qur'an, tapi tidak bercakap dalam bahasa Arab.

<sup>6</sup> Ahmad Djajadiningrat mengajukan usul itu dalam pertemuan *Volksraad* pada tanggal 28 Mei 1918 (Nagatsumi, 1980: 206—209). Hari itu adalah hari ke-10 setelah *Volksraad* dibuka secara resmi.

<sup>7</sup> Orang awam biasanya belajar ngaji sejak kecil sebagai pendidikan agama. Oleh karena itu, mereka membiasakan pelafalan bahasa Arab, dan ada juga yang menguasai bahasa Arab di antaranya sejak lama sampai sekarang.



## 2. Masyarakat Multilingual Setelah Kemerdekaan

Rupanya, pada zaman setelah kemerdekaan, masyarakat poliglossia dan multilingual tersebut dibawa oleh kebijakan bahasa ke arah lain. “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia” ditetapkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Arah yang dituju adalah masyarakat monoglossia dan monolingual, yaitu bahasa Indonesia yang diutamakan demi persatuan bangsa dan pembangunan negara. Bahasa-bahasa daerah tidak begitu dihormati di bawah kebijakan monolingual, walaupun ditetapkan dalam UUD 1945 bahwa bahasa daerah harus dipelihara dan dihormati. Bahasa asing, terutama bahasa Belanda, lambat laun disingkirkan dari segala kegiatan masyarakat. Namun, tidaklah mudah memupus pemakaian bahasa Belanda yang sudah lama dan secara mendalam merasuk ke dalam kehidupan banyak orang, khususnya kalangan terdidik. Misalnya, pada zaman Orde Lama para pemimpin dan tokoh masyarakat, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, adalah orang-orang yang dididik dalam sistem pendidikan Belanda dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Akan tetapi, kebijakan bahasa yang menuju masyarakat monolingual dipacu dengan berbagai kejadian pada zaman Orde Baru. Yang pertama adalah kejadian Gerakan 30 September 1965. Presiden Soeharto melarang pemakaian bahasa Tionghoa di ruang publik sejak tahun 1966. Keturunan Tionghoa dan peranakan yang pernah mampu berbahasa Tionghoa semakin lama semakin sedikit oleh karena pelarangan itu.

Pemakaian bahasa Belanda di tengah masyarakat pun semakin lama semakin surut. Hubungan Indonesia dengan Belanda tidak baik lagi setelah Presiden Soeharto menolak bantuan lewat kerangka *Inter-Governmental Group on Indonesia* atau IGGI pada bulan Maret tahun 1992. Sejak kejadian ini kerja sama di antara kedua negara, misalnya di bidang pendidikan, menjadi sangat sedikit dan terbatas. Pengaruh bahasa dan budaya Belanda semakin tidak terasa bersamaan dengan hilangnya generasi tua yang pernah mengenyam pendidikan zaman kolonial.

Pengajaran dan pemakaian bahasa Arab juga tidak terlalu berkembang dalam pemerintahan Orde Baru. Semua sektor yang berpotensi membahayakan stabilitas politik dan pembangunan nasional, termasuk kelompok agama Islam, pun ditekan oleh pemerintah. Pemakaian bahasa Arab dan kegiatan agama Islam berkurang dan tidak kelihatan di ruang publik, terutama di perkotaan, meskipun tradisi pengajaran Islam di masyarakat, khususnya di pedesaan, tetap berjalan tak berubah di tengah tekanan terhadap agama yang terasa di mana-mana.

Aspirasi daerah selalu ditekan dalam pemerintahan Orde Baru. Pemerintah pusat mencoba menguasai seluruh wilayah negara Republik. Konvergensi kekuatan di daerah dianggap bibit bahaya dan ketidakstabilan negara persatuan, serta dianggap akan mengganggu perkembangan ekonomi dan pembangunan negara. Oleh karena itu, bahasa daerah pun tidak dihormati dan tidak dikembangkan sepatutnya walaupun hal itu dijamin dalam UUD sebagaimana yang kita lihat di atas. Dengan demikian, bahasa daerah pada umumnya tidak dipakai dalam ruang publik dan tidak diajarkan di sekolah. Bahasa daerah seperti bahasa Sunda hanya dipakai di ruang pribadi dan jarang diandalkan dalam publikasi.

Bahasa Indonesia memperkuat posisinya sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa media, bahasa



administrasi, dan bahasa pendidikan. Dapat dikatakan bahwa kebijakan bahasa di Indonesia seperti ini sangat berhasil untuk mempersatukan bangsa dan memperkuat solidaritas, dan efisiensi pemakaian satu bahasa memajukan perkembangan ekonomi dan pembangunan. Penting juga diperhatikan bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia berhasil memberantas buta huruf dalam waktu singkat. Kemahiran berbahasa Indonesia menjadi erat kaitannya dengan keberhasilan material bagi semua warga. Berbeda dengan masa kolonial, juga masa globalisasi sekarang ini, yang mementingkan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Dapat dikatakan bahwa proporsi peran bahasa sedikit "pincang" karena tidak memanfaatkan kegunaan bahasa lain yang ada di lingkungan masyarakat.

Namun demikian, kebijakan bahasa monolingual mengorbankan bahasa lain seperti bahasa asing, bahasa etnis, dan bahasa daerah. Masyarakat multilingual sebelum kemerdekaan mempunyai kekayaan dan keanekaragaman budaya dan nilai-nilai di tengah masyarakat. Hal ini disadari menjelang akhir abad ke-20 karena kemampuan berbahasa Inggris di Indonesia jauh terbelakang di lingkungan masyarakat internasional dan jumlah penutur bahasa-bahasa daerah semakin berkurang. Kita akan melihat arus balik dari kebijakan bahasa di bagian berikut.

### 3. Masyarakat Multilingual pada Zaman Globalisasi

"Kepincangan" dan kerugian dalam kebahasaan terasa di balik kebijakan bahasa monolingual mulai tahun 1980-an. Usaha untuk menghormati budaya etnis dan bahasa daerah dicoba dalam pendidikan dengan mata pelajaran "muatan lokal" atau "mulok" (Moriyama, 2012a). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Bahasa (pada waktu itu masih Pusat Bahasa) mempunyai peranan yang berarti dalam usaha ini. Memang bahasa daerah tidak hilang dan punah sama sekali di bawah kebijakan bahasa tersebut, tetapi keadaan pemakaian bahasa daerah menjadi sangat memprihatinkan. Bahasa daerah seperti bahasa Sunda ada kesan negatif saja di belakang bahasa nasional seperti terbelakang, dusun, tidak resmi, tidak modern, tidak berkembang dan lain-lain (Moriyama, 2012a).

Perubahan keadaan politik, khususnya pergantian pemerintahan pada 1998, merupakan *trigger* atau titik tolak perubahan masyarakat dan juga kebahasaan di Indonesia. Kebetulan perkembangan ICT (*Information and Communication Technology*) pun mulai terasa di Indonesia. Telepon genggam dan jaringan internet memasuki kehidupan orang sehari-hari. Dengan sarana ini masyarakat Indonesia pun dibawa ke dalam arus globalisasi. Kedua unsur yang sangat signifikan ini merasuki benak orang sehingga kelihatannya kesadaran dan perspektifnya mengenai dunia hidup pun berubah. Mereka menyadari masyarakat Indonesia berada di arus informasi yang mengalir secara global lewat internet. Reformasi dalam bidang politik melepaskan masyarakat dari belenggu selama 30 tahun sehingga kebebasan dan demokratisasi di berbagai bidang seperti media massa terasa oleh rakyat.

Perubahan sosial dan politik ini mengubah kebahasaan, antara lain, proporsi pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahasa asing khususnya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Pertama-tama, bahasa daerah menjadi lebih dihormati sebelumnya dengan peningkatan otonomi daerah (Kagami, 2010: 157—158). Misalnya, Provinsi Jawa Barat menetapkan bahwa bahasa Sunda diwajibkan pada semua jenjang pendidikan pada 2006 dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat dan





Peraturan Daerah No. 5 berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2005 (Moriyama, 2010: 256—260). Selanjutnya, cukup menarik membaca bunyi dokumen mengenai penyusunan kurikulum dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2006 sebagai berikut: "Murid menghargai dan membanggakan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah dan bahasa resmi kedua di Jawa Barat (setelah bahasa Indonesia)" (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan, 2006: 2—3). Kalimat ini dapat dianggap sebagai suatu ekspresi identitas dan aspirasi orang Sunda yang sudah lama ditekan dalam kedua pemerintahan sebelumnya. Mereka ingin menempatkan bahasa daerah pada tempat yang pantas, tetapi tetap menghormati bahasa nasional. Namun, perubahan seperti ini tidak terjadi pada setiap bahasa daerah. Rupanya, kasus bahasa Sunda ini dapat dikatakan agak istimewa apabila dilihat dari segi aspirasi daerah.

Perubahan yang cukup menonjol juga terjadi pada bahasa Mandarin. Bahasa asing yang selama 3 dekade dilarang dipakai di ruang publik ini secara mendadak muncul di ruang publik karena larangan pemerintah dihapus pada masa Reformasi. Buku-buku berbahasa Mandarin dijual di toko buku, kursus bahasa Mandarin diminati, media massa seperti acara TV dan koran menyiarkan berita dalam bahasa Mandarin kembali. Namun, belenggu yang begitu lama itu sudah merebut kemampuan berbahasa Mandarin dari etnis Tionghoa sehingga tidak semudah dan secepat membangkitkan kembali bahasa asing ini. Betapa pun, sangat penting dicatat bahwa bahasa Mandarin pun boleh dipelajari dan dipakai secara terbuka di lingkungan masyarakat multilingual.

Hal yang sama pernah terjadi pada bahasa Arab. Sebagaimana kita lihat di atas, Islam juga ditekan waktu pemerintahan Orde Baru karena aspirasi Muslim dilihat salah satu benih bahaya demi stabilitas politik. Begitu demokratisasi masyarakat pada era Reformasi melepaskan belenggu, bahasa Arab menjadi lebih kedengaran di ruang publik baik di perkotaan maupun di pedesaan. Berbeda dengan bahasa Mandarin yang ditekan secara ketat pada masa Orde Baru, bahasa Arab tidak berhenti dipelajari di sekolah dan madrasah di lingkungan agama di seluruh wilayah, khususnya di pedesaan. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa Arab itu terpelihara selama pemerintahan Orde Baru. Bahasa Arab mudah bangkit kembali dan memasuki ruang publik. Ekspose Islam tidak terbatas dalam pemakaian bahasa Arab, melainkan juga terlihat menonjol pada busana Muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Terakhir, dapat dikatakan bahwa perubahan yang paling menonjol dalam kebahasaan adalah pemakaian bahasa Inggris. Bersama dengan perkembangan ICT yang pesat dibahas di atas, informasi dari luar masuk dengan deras seperti air dari bendungan yang rusak. Kebanyakan informasi diakses dalam bahasa Inggris, dan bahasa Inggris disadari betul sebagai kunci untuk masuk dunia global. Bertambah pula arus manusia yang masuk dan keluar baik bidang bisnis maupun bidang pelancongan (pariwisata). Sekolah-sekolah, dari sekolah dasar sampai dengan SMA, memberikan pelajaran bahasa Inggris lebih intensif, malah ada sekolah yang mengajar dalam bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.<sup>8</sup> Pemakaian bahasa Inggris dalam media massa meningkat secara mendadak dan selebar-lebarnya. Pada umumnya kosakata atau ungkapan bahasa Inggris masuk

---

<sup>8</sup> Walaupun demikian, mata pelajaran bahasa Indonesia, agama, dan kewarganegaraan dipelajari dalam bahasa Indonesia di sekolah-sekolah yang berbahasa Inggris.



dalam wacana bahasa Indonesia. Percampuran kosakata atau kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia terjadi tidak hanya dengan bahasa Inggris, melainkan juga dengan bahasa Arab.

Kelihatannya, pada zaman globalisasi ini terjadi perubahan kebahasaan yang cukup mencolok. Banyak bahasa terdengar dalam kehidupan sehari-hari, dan orang semakin menjadi multilingual. Sebelum abad ke-21 memang orang hanya mengandalkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tetapi pada masa globalisasi orang menambah bahasa tanpa ragu-ragu. Muncullah masyarakat multilingual yang berbeda dengan masyarakat kolonial. Pada masa kolonial berbagai masyarakat memakai bahasa masing-masing, tetapi tidak banyak orang yang multilingual, kecuali kalangan atas. Pada abad ke-21 ini muncullah masyarakat multilingual secara keseluruhan negara. Yang perlu dipikirkan adalah proporsi peran di antara bahasa-bahasa yang berlainan dan bagaimanakah orang disarankan berbahasa.

## **PENUTUP**

Bahasa itu sulit diatur, yang dapat dilakukan adalah menyarankan pemakaian bahasa secara tidak langsung. Pada zaman demokratisasi dan kebebasan masyarakat tidak bisa diarahkan dengan peraturan yang mendikte. Pada zaman globalisasi ini pemakaian bahasa yang pantas harus dipikirkan oleh masyarakat dan juga organisasi yang bertanggung jawab. Perlu diberi tahu bagaimana pentingnya kemampuan berbahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Kemampuan menulis yang baik itu perlu dibina dengan sungguh-sungguh. Hal itu sama juga dengan bahasa Inggris. Hanya berkomunikasi secara lisan saja tidak cukup. Yang perlu dipelajari secara serius adalah tata bahasa bahasa Inggris juga untuk menulis dalam bahasa Inggris yang benar dan baik. Bahasa tulisan yang baik perlu dikuasai dan juga isinya pun sangat penting. Kalau isinya dangkal dan tidak ada keasliannya, orang tidak akan mendengarnya di arena internasional. Hal ini perlu diajarkan di semua jenjang pendidikan.

Namun, masyarakat Indonesia yang multilingual perlu didukung dan didorong. Banyak bahasa di masyarakat dan orang yang berbahasa jamak merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Perlu diteguhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa daerah harus dihargai sebagai kekayaan budaya dan identitas. Orang harus belajar bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan sungguh-sungguh sebagaimana mereka belajar bahasa asing. Tata bahasa dan seni bahasa juga harus diperhatikan supaya mereka bisa berkompetensi bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Rupanya ada kesalahpahaman bahwa bahasa Inggris lebih berprestasi dan bergensi daripada bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Hal seperti ini perlu dibenarkan di sekolah-sekolah secara serius.

Rupanya, definisi orang intelektual antara zaman kolonial dan zaman globalisasi tidak begitu berbeda dari segi kebahasaan. Sebagaimana kita lihat contoh Ahmad Djajadiningrat yang berbahasa Sunda, Jawa, Melayu, Arab, dan Belanda, orang intelektual sekarang juga ada yang berbahasa daerah, Indonesia, Arab, dan Inggris. Orang yang berbahasa Arab dihargai di masyarakat kalau beliau memberi khotbah selain berceramah ilmiah dalam bahasa Inggris. Sisi rohaniah tidak bisa diabaikan dalam perkembangan manusia selain hal duniawi.



Dapat dikatakan bahwa bahasa-bahasa mewujudkan kekuatan atau mendapatkan dinamika kembali yang sebenarnya pada awal abad ke-21 ini. Keadaan seperti ini perlu disambut dan dipertahankan demi perkembangan masyarakat yang lebih beradab. Sehubungan dengan itu, perlu juga dipikirkan proporsi yang patut antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Lebih banyak bahasa lebih baik bagi orang dan bagi masyarakat. Indonesia diharapkan mempertahankan masyarakat multilingual dengan proporsi yang pantas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adelaar, K. Alexander and D.J. Prentice. (1996). "Malay: Its history, role and spread", in S.A. Wurum, P. Muhlhausler and D. Tryon (eds.), *Atlas of languages of intercultural communication in the Pacific, Asia and the Americas*. Berlin; New York: Mouton – de Gruyter.
- Agha, A. (2007). *Language and social relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Anderson, Benedict. (2016). *A life beyond boundaries*. London; New York: Verso.
- Coppel, Charles A. (1983). *Indonesian chinese in crisis*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Djajadiningrat, A. (1936). *Herinneringen van pangeran aria ahmad djajadiningrat*. Amsterdam/Batavia: G. Koff & Co.
- Errington, Joseph. (2000). Indonesian('s) Authority, in Paul V. Kroskrity ed., *Regimes of language: Ideologies, politics, and identities*, 205—227. Santa Fem New Mexico: School of American Research Press; Oxford: James Currey.
- Foulcher, Keith. (2012) "Fluid transitions in an era of reform" in Keith Foulcher, Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman ed., *Words in motion: language and discourse in post-new order Indonesia*, pp. 1—15, Singapore: NUS Press.
- Goebel, Zane. (2010). *Language, migration, and identity: Neighborhood talk in indonesia*. Cambridge University Press.
- Hwia, Ganjar. (2010). "Perencanaan bahasa di indonesia dan rancangan undang-undang kebahasaan: tuntutan komunikasi dan implikasinya", dalam Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman (eds.) *Geliat bahasa selaras zaman: Perubahan bahasa-bahasa di indonesia pasca-orde baru*, pp. 32—59. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kagami, Haruya. (2010). "Pemakaian bahasa nasional/daerah di kalangan remaja: sebuah studi kasus dari bali" dalam Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman (eds.) *Geliat bahasa selaras zaman: perubahan bahasa-bahasa di indonesia pasca-orde baru*, pp. 152—167. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Maier, H. M. J. (1993) "From heteroglossia to polyglossia: The creation of malay and dutch in the indies", *Indonesia* 56: 37-65.
- Moriyama, Mikihiro. (2005). *Sundanese print culture and modernity in 19th-century west java*. Singapore: Singapore University Press.
- , (2008). "Revival of the sundanese language?: Some preliminary views on a regional language in indonesia", *Academia: Literature and Language* 83: 211—226.



- . (2009). “Lord hunting tiger and malay learning in japan before the war”, in Mary Kilcline Cody and Jan van der Putten (eds.) , *Time, texts and technologies: Explorations in the malay garden of knowledge*, pp. 54-65. Singapore: Singapore University Press.
- . (2010). “Bahasa daerah dan desentralisasi pada masa pasca-orde baru”, in Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman (eds.) *Geliat bahasa selaras zaman: perubahan bahasa-bahasa di indonesia pasca-orde baru*, pp. 249-274. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- . (2012a). “Regional languages and decentralisation in post – new order indonesia: the case of sundanese”, in Keith Foulcher, Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman ed., *Words in motion: language and discourse in post-new order Indonesia*, pp. 82-100. Singapore: NUS Press.
- . (2012b). “Indonesia ni okeru tagengo jyoukyouto ‘gengo seisaku’ (Keadaan multilingual dan kebijakan bahasa di indonesia)”, in Yukitoshi Sunano ed. *Tagengosyugi saikou: Tagengo joukyou no hikaku kenkyu (Pikirkan kembali multilingualism: Studi banding mengenai keadaan multilingual)*, pp. 407-429. Tokyo: Sangen Sha.
- . (2015a). “Indonesiako no ringahuranka tositeno yakuwari no henshen: Ranryou-higashi-indo zidai kara Guroobaruka no zidai made (Perubahan peranan bahasa indonesia sebagai lingua franca: Dari zaman hidia belanda sampai zaman globalisasi)”, *Kotoba to syakai (Language and society)* No, 17: 30—50.
- . (2015b). “Bahasa sunda dalam berdoa”, in Julian Millie and Dede Syarif ed., *Islam dan regionalisme*, pp. 107-116. Bandung: Pustaka Jaya.
- Nagatsumi, Akira. (1980). *Indonesia minzoku ishiki no keisei (The formation of indonesian nationalism)*. Tokyo: Tokyo University.
- Ophuijsen, Ch. A. van. (1901). *Kitab logat melajoe: Woordenlijst voor de spelling der maleische taal met latijnsch karakter*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Putten, Jan van der. (2012). “Going against the tide: the politics of language standardisation in indonesia”, in Keith Foulcher, Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman ed., *Words in motion: language and discourse in post-new order Indonesia*, pp. 257—279. Singapore: NUS Press.
- Quinn, George. (2012). “Emerging from dire straits: post – new order developments in javanese language and literature”, in Keith Foulcher, Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman ed., *Words in motion: language and discourse in post-new order indonesia*, pp. 65-81. Singapore: NUS Press.
- Shiohaya, Asako. (2010). “Penutur bahasa minoritas di indonesia timur: Mempertanyakan keuniversalan konsep multibahasa”, dalam Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman (eds.) *Geliat bahasa selaras zaman: perubahan bahasa-bahasa di indonesia pasca-orde baru*, pp. 168-206. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Taylor, Jean Gelman. (2004) *Indonesia: peoples and histories*. New Haven; London: Yale University Press.
- Tsuda, Koji. (2010). “Etnis tionghoa yang belajar bahasa mandarin: pencarian ‘kecinaan’-nya?” dalam Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman (eds.) *Geliat bahasa selaras zaman: Perubahan bahasa-bahasa di indonesia pasca-orde baru*, pp. 306—354. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.



Yuwono, Untung. (2012) “Ifil gue sama elu! (I’ve had it with you!): Swear-Words in Contemporary Indonesian Youth Slang”, in Keith Foulcher, Mikihiro Moriyama and Manneke Budiman ed., *Words in Motion: Language and discourse in post-new order Indonesia*, pp. 16—43. Singapore: NUS Press.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 3 Kelompok 9**

Pembicara : Mikihiro Moriyama  
Judul Makalah : "Masyarakat Multilingual dan Kebijakan Bahasa di Indonesia"  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 13.45—15.15  
Moderator : Dr. Mustakim, M.Hum.  
Pencatat : 1. Triwulandari  
2. Winci Firdaus

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Dapat dikatakan bahwa Indonesia berhasil mengukuhkan bahasa nasional setelah kemerdekaan dengan suatu kebijakan bahasa. Hal ini bukan hal yang mudah dan wajar. Harus ada usaha dan perjuangan dengan pemikiran tertentu apalagi kita menimbang Indonesia pernah berada di bawah penjajahan lebih dari seratus tahun.
2. Makalah ini akan menelusuri sejarah singkat keadaan kebahasaan dalam masyarakat Indonesia untuk memikirkan subtopik "Proporsi Peran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Asing".
3. Bisa dikatakan ada semacam piramida bahasa, yaitu di tingkat paling atas ada bahasa Belanda, lapisan kedua adalah bahasa Melayu, dan lapisan yang paling bawah adalah bahasa-bahasa suku bangsa. Piramida ini sejajar dengan hierarki sosial pada masa itu. Kaum penjajah memakai bahasa Belanda, kaum elite pribumi berkomunikasi dengan penjajah dan sesama elite pribumi dalam bahasa Belanda, sedangkan dengan pribumi bawahannya dalam bahasa Melayu.
4. Bahasa Belanda tidak dijadikan bahasa komunikasi karena mereka menganggap bahasa Belanda terlalu sulit untuk rakyat jajahan dan makan biaya banyak. Kebijakan bahasa ini diterapkan dan dikembangkan melalui pendirian *Commissie voor de Inlandsche School- en Volkslectuur* atau Komisi untuk Buku-buku Sekolah Bumiputra dan Buku-buku Bacaan Rakyat pada 1908 yang kemudian dijadikan Balai Poestaka pada tahun 1917.
5. Dapat dikatakan bahwa kebijakan bahasa ini membutuhkan anggaran yang cukup besar bagi pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Sekali lagi kebijakan ini berbeda dengan negara jajahan yang lain. Maier menilai kebijakan bahasa yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu tidak berhasil karena tidak konsisten dengan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi di seluruh wilayah jajahannya.
6. Bahasa Indonesia memperkuat posisinya sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa media, bahasa administrasi, dan bahasa pendidikan. Dapat dikatakan bahwa kebijakan bahasa di Indonesia seperti ini sangat berhasil untuk mempersatukan bangsa dan memperkuat solidaritas, dan efisiensi pemakaian satu bahasa memajukan



- perkembangan ekonomi dan pembangunan. Penting juga diperhatikan bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia berhasil memberantas buta huruf dalam waktu singkat.
7. Bahasa itu sulit diatur, yang dapat dilakukan adalah menyarankan pemakaian bahasa secara tidak langsung. Pada zaman demokratisasi dan kebebasan masyarakat tidak bisa diarahkan dengan peraturan yang mendikte. Pada zaman globalisasi ini pemakaian bahasa yang pantas harus dipikirkan oleh masyarakat dan juga organisasi yang bertanggung jawab. Perlu diberi tahu bagaimana pentingnya kemampuan berbahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Kemampuan menulis yang baik itu perlu dibina dengan sungguh-sungguh.
  8. Masyarakat Indonesia yang multilingual perlu didukung dan didorong. Banyak bahasa di masyarakat dan orang yang berbahasa jamak merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Perlu diteguhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa daerah harus dihargai sebagai kekayaan budaya dan identitas. Orang harus belajar bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan sungguh-sungguh sebagaimana mereka belajar bahasa asing. Tata bahasa dan seni bahasa juga harus diperhatikan supaya mereka bisa berkompetensi bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Rupanya ada kesalahpahaman bahwa bahasa Inggris lebih berprestasi dan bergengsi daripada bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Hal seperti ini perlu dibenarkan di sekolah-sekolah secara serius.
  9. Rupanya, definisi orang intelektual antara zaman kolonial dan zaman globalisasi tidak begitu berbeda dari segi kebahasaan. Sebagaimana kita lihat contoh Ahmad Djajadiningrat yang berbahasa Sunda, Jawa, Melayu, Arab, dan Belanda, orang intelektual sekarang juga ada yang berbahasa daerah, Indonesia, Arab, dan Inggris. Orang yang berbahasa Arab dihargai di masyarakat kalau beliau memberi khotbah selain berceramah ilmiah dalam bahasa Inggris. Sisi rohaniah tidak bisa diabaikan dalam perkembangan manusia selain hal duniawi.
  10. Dapat dikatakan bahwa bahasa-bahasa mewujudkan kekuatan atau mendapatkan dinamika kembali yang sebenarnya pada awal abad ke-21 ini. Keadaan seperti ini perlu disambut dan dipertahankan demi perkembangan masyarakat yang lebih beradab. Berkaitan dengan itu, perlu juga dipikirkan proporsi yang patut antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Lebih banyak bahasa lebih baik bagi orang dan bagi masyarakat. Indonesia diharapkan mempertahankan masyarakat multilingual dengan proporsi yang pantas.

## **Tanya Jawab**

### **Penanya 1**

Nama : Dadang Sunendar  
Instansi : Badan Bahasa



**Pertanyaan:**

Tidak banyak orang Indonesia yang paham dengan sejarah bahasa. Bagaimana prediksi abad 22 terkait dengan bahasa Indonesia?

**Jawaban:**

Peneliti sangat berharap peranan Badan Bahasa harus ditingkatkan. Badan Bahasa sangat penting terkait dengan fungsi kebahasaan di Indonesia. Indonesia begitu kaya namun apabila dibiarkan maka bahasa akan punah. Bahasa daerah perlu dipromosikan agar keberadaannya tetap terjaga.

**Penanya 2**

Nama : Yayah Lumintaintang  
Instansi : Badan Bahasa

**Pertanyaan:**

Prediksi Bapak terkait bahasa di Indonesia bagaimana? Ini penting Bapak ungkapkan, saat ini fungsi bahasa terkadang tidak sesuai dengan fungsinya, para birokrat seolah tidak peduli dengan perencanaan bahasa.

**Jawaban:**

Terima kasih atas pandangan dan masukan dari Ibu Yayah.

**Penanya 3**

Nama : Mahdi  
Instansi : SMPN 1 Kendari, Sulteng

**Pertanyaan:**

Saya ingin mendapatkan wawasan dari Bapak, mohon pandangan Bapak bagaimana melestarikan bahasa daerah yang bisa menjadi modal untuk bangsa kami?

**Jawaban:**

Ketika orang asing berkunjung ke Indonesia, mereka akan mencari sesuatu yang berbeda. Bahasa daerah menjadi kunci untuk melestarikan budaya setempat, bahkan dapat menarik perhatian orang asing (turis). Orang asing akan mencari yang khas, salah satunya adalah bahasa daerah.

**Penanya 4**

Nama : Elis  
Instansi : Unpad

**Pertanyaan:**

Saya mengapresiasi atas keinginan Pak Miki mempelajari bahasa Sunda. Saya berharap generasi muda dapat mengikuti jejak Pak Miki.

**Jawaban:**

Terima kasih atas pandangan dan masukan dari Ibu Elis.



**Penanya 5**

Nama : Kishor Kumar Das

Instansi : Siaran Luar Negeri, All India Radio, New Delhi, India

**Pertanyaan:**

Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan Asia Tenggara. Bagaimana pandangan apabila bahasa Indonesia digunakan pada forum-forum internasional?

**Jawaban:**

Kita tidak perlu memaksakan bahasa Indonesia agar dikuasai oleh orang asing di Asia Tenggara atau internasional. Setiap bangsa memiliki jati diri. Negara Indonesia belum memperhatikan pusat budaya dan bahasa. Kita lebih baik memperhatikan dan menjaga bahasa daerah agar tetap terjaga keberadaannya.

**Isu-Isu Penting:**

1. Perubahan sosial dan politik mengubah kebahasaan.
2. Pentingnya bahasa Indonesia pada zaman globalisasi, kemampuan menulis perlu dibina.
3. Peran Badan Bahasa sangat penting untuk menjaga bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
4. Bahasa daerah bisa dijadikan sebagai sarana promosi bangsa, sekaligus menunjukkan jati diri bangsa.
5. Pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri perlu diperbanyak untuk membantu penyebarluasan bahasa daerah dan bahasa Indonesia di dunia.



### 3. Internalisasi dan Internasionalisasi Bahasa Indonesia

#### INTERNALISASI DAN INTERNASIONALISASI BAHASA INDONESIA<sup>1</sup>

Suparno

Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang

suparno.fs@um.ac.id

#### Abstrak

Berkat kebijakan politik bahasa nasional yang terealisasi dalam program-program pengembangan dan pembinaan bahasa, Bahasa Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat sehingga Bahasa Indonesia telah memiliki kapasitas yang layak sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kapasitas itu sejalan dengan perkembangan kapasitas masyarakat dan bangsa Indonesia yang mampu menggunakan Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghadapi era global yang dipadati oleh komunikasi komunitas global, Bahasa Indonesia telah menjadi alat komunikasi komunitas internasional. Fungsinya dalam era global itu perlu harmonis dengan fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Menghadapi perkembangan tersebut, dua dimensi pengembangan dan pembinaan bahasa perlu diperhatikan, yakni internalisasi yang berdimensi internal dan internasionalisasi yang berdimensi internasional atau global.

**Kata-kata kunci:** bahasa Indonesia, perencanaan bahasa, internalisasi, internasionalisasi

#### PENDAHULUAN

Pada era global terjadi tiga dimensi kehidupan yang tarik-menarik, yakni kehidupan lokal, kehidupan nasional, dan kehidupan global. Tiga dimensi kehidupan itu melahirkan tiga paham dan kondisi berikut: lokalisme dan lokalitas, nasionalisme dan nasionalitas, dan globalisme dan globalitas. Untuk memenuhi harmoni kehidupan, diperlukan tiga kearifan (*wisdom*) yang harmonis, yang sering disebut kearifan lokal, kearifan nasional, dan kearifan global. Setiap kearifan itu merupakan sistem tata nilai yang berlaku atau dilakukan oleh individu, satuan komunitas, satuan etnik, dan/atau bangsa dalam bingkai kehidupan yang harmonis.

Tiga dimensi kehidupan tersebut berkait dengan penggunaan bahasa sesuai dengan komunitas bahasa yang memerlukan. Komunitas global atau komunitas regional menggunakan bahasa internasional. Komunitas nasional menggunakan bahasa nasional atau bahasa negara. Komunitas lokal menggunakan bahasa daerah jika komunitas itu memiliki dan mampu menggunakan bahasa daerah.

Dalam kondisi persaingan global tersebut, kapasitas bahasa merupakan andalan persaingan. Ada bahasa berkapasitas kuat, ada pula bahasa yang berkapasitas kurang kuat. Bahasa Inggris jelas berkapasitas kuat, bahkan sangat kuat, baik pada skala global maupun pada skala regional. Jika negara-negara kawasan sudah memiliki bahasa internasional, misalnya kawasan Timur Tengah yang sudah memiliki bahasa Arab, bahasa kawasan menjadi salah satu pilihan prioritas di samping bahasa Inggris.

Dengan mengesampingkan label **bahasa internasional**, Bahasa Indonesia memiliki peluang digunakan dalam era global dan/atau regional Asia Tenggara.



Kapasitasnya dalam konteks itu dapat dinalar berdasarkan pertimbangan berikut. Pertama, Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa modern, terutama sebagai bahasa bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menjadi ukuran modernitas bahasa. Oleh sebab itu, dengan berfungsinya bahasa sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni modern, bahasa Indonesia sudah termasuk sebagai bahasa modern. Sebagai catatan kecil, Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa syair lagi-lagu dangdut dalam skala regional, sebagaimana terbukti dalam lagu-lagu dangdut dalam D'Academy Asia yang diikuti oleh negara-negara berikut: Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam, Timor Leste, dan Thailand.

Kedua, berkaitan dengan pertimbangan pertama tersebut, Bahasa Indonesia sudah memiliki perangkat kelengkapan diri yang siap berkembang secara dinamis sesuai dengan kemajuan era yang dinamis pula. Kelengkapan diri itu adalah kaidah gramatikal, kaidah fonologis, kekayaan kata dalam kosakata, dan kaidah pembentukan istilah untuk pengayaan kosakata, serta kaidah ejaan. Kelengkapan diri itu memiliki kapabilitas dinamis sesuai dengan kebutuhan penggunaan yang juga dinamis.

Ketiga, sudah cukup bukti bahwa bahasa Indonesia menarik perhatian dunia internasional. Bukti-bukti tersebut tampak pada perkembangan kemajuan Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berdirinya lembaga kajian tentang Bahasa Indonesia dan/atau kajian tentang Indonesia (*Indonesian studies*) di perguruan tinggi luar negeri, dan kebutuhan tenaga-tenaga profesional yang berkompetensi profesional dengan penguasaan Bahasa Indonesia, misalnya pemandu wisata, tenaga ahli luar negeri yang bekerja di Indonesia, dan profesional lainnya.

Paparan tersebut menyiratkan perlunya pengembangan dan pembinaan Bahasa Indonesia dalam dua dimensi, yakni dimensi nasional dengan nasionalisasi dan dimensi internasional dengan internasionalisasi. Dengan demikian, internalisasi mengacu pengembangan dan pembinaan bahasa berdimensi internal atau nasional, sedangkan internasionalisasi mengacu pengembangan dan pembinaan bahasa berdimensi internasional atau global. Program dan upaya yang terkait dengan kedua acuan itu mencakup penguatan, pemberdayaan, pengembangan, pemekaran, pencangghian, dan sebagainya yang relevan.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Bahasa Indonesia dalam Perspektif Historis dan Politik Bahasa**

Berdasarkan fakta historis pertumbuhan dan perkembangan alat komunikasi bangsa Indonesia, terungkap fenomena terbentuknya bahasa perhubungan (*langua franca*) yang menarik. Bahasa perhubungan itu berakar dari Bahasa Melayu Riau yang penggunaannya tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Persebaran itu berlangsung berabad-abad secara alamiah bersamaan dan sejalan dengan kehadiran para pedagang (*trader*) dan pelancong (*traveler*) baik yang berasal dari daerah-daerah di Nusantara maupun dari negara-negara luar Nusantara, seperti Arab, Cina, India, dan negara-negara Barat. Mereka berada dalam komunitas majemuk berdasarkan latar belakang kebangsaan, budaya, adat-istiadat, dan bahasanya. Sebagaimana dipaparkan oleh Sneddon (2003:7--9), komunitas baru yang beraneka latar kehidupan itu menggunakan Bahasa Melayu.



Dengan kebutuhan alat komunikasi bersama tersebut, bahasa Melayu tersebar luas di seluruh Nusantara. Bahasa Melayu yang tersebut di berbagai daerah Nusantara itu secara bertahap memiliki fitur yang berbeda dari Bahasa Melayu Riau. Dengan fitur yang berbeda itu, Bahasa Melayu yang tersebar luas dan berfungsi sebagai *lingua franca* itu tidak berfitur sepenuhnya sama dengan Bahasa Melayu Riau.

Pada awal penggunaan di daerah-daerah Nusantara, wajarlah jika penggunaan Bahasa Melayu dialek terbatas di kota-kota sebagai pusat-pusat kegiatan komunitas mejemuk. Sampai tahun 60-an, di Jawa masih dikenal label *Cara Mlayu* (Cara Melayu) yang merupakan salah satu jejak kehadiran dan penggunaan Bahasa Melayu itu. Pada perkembangan selanjutnya, dapat dipastikan bahwa Bahasa Melayu yang tersebar di berbagai daerah Nusantara berbeda dengan Bahasa Melayu Riau dan memiliki fitur inti bersama yang layak diangkat menjadi bahasa bersama dengan nama **bahasa Indonesia**.

Berdasarkan fakta historis pula, terjadi peristiwa dalam sejarah politik kebangsaan dan kenegaraan serta kebahasaan yang dikenal dengan nama **Sumpah Pemuda** pada tanggal 28 Oktober 1928. Isi dan rumusan lengkap teks Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut.

**Kami poetera dan poeteri Indonesia mengakoe bertoempah darah satoe, Tanah Air Indonesia.**

**Kami poetera dan poeteri Indonesia mengakoe berbangsa satoe, Bangsa Indonesia**

**Kami poetera dan poeteri Indonesia mendjoenjoeng tinggi bahasa persatoean, Bahasa Indonesia.**

Dalam teks Sumpah Pemuda itu, nama **bahasa Indonesia** digunakan secara formal dalam konteks pengakuan pemuda dalam menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bersama pengakuan dua butir sumpah yang lain. Hal yang fenomenal dalam Sumpah Pemuda itu adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai salah satu pilar dalam rangka perjuangan pembentukan dan pendirian bangsa dan negara, sebagai pilar strategis yang terbukti benar.

Sumpah Pemuda itu berkandungan jiwa, spirit, dan moral kebangsaan yang tidak hanya mengikat satu generasi pelaku sumpah, tetapi juga mengikat generasi-generasi penerus bangsa secara berkelanjutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterikatan itu tidak mengenal batas waktu dan tempat, batas perbedaan suku dan golongan, batas perbedaan usia, batas kelas sosial kemasyarakatan, dan batas-batas perbedaan lain dalam kehidupan bangsa yang majemuk.

Dalam sejarah kebangsaan dan kenegaraan, bahasa Indonesia memiliki kedudukan terhormat dan strategis sebagai bahasa nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda telah menjadi bukti awal kebijakan politik bahasa yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Menyadari atau tidak, para pelaku Sumpah Pemuda sudah menjadi pelaku kebijakan politik bahasa nasional.

Berdasarkan kedudukan itu, ada kebijakan politik lanjutan dengan menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tercantumnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada Pasal 36 Undang-undang Dasar 1945 menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia telah mendapatkan posisi sebagai bahasa resmi negara sebagai salah tomggak bersejarah kebijakan politik bahasa nasional.



Berdasarkan sejumlah peristiwa historis sebagaimana dipaparkan di depan, dapat disimpulkan bahwa perjuangan kemerdekaan dan pembentukan bangsa dan negara Republik Indonesia sudah disertai dengan perjuangan untuk memiliki bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kondisi demikian itu sejalan dengan pernyataan Wright (2016:47) berikut.

*The history of the politics of nation state building reveals how the conscious promotion convergence was part of development nation state. The national language takes on a number of important roles in the nation building process.*

Dengan status dan fungsi strategis bahasa Indonesia dalam konteks eksistensinya bersama-sama dengan bahasa daerah dan bahasa asing, penguatan eksistensi dan fungsi itu beserta kebijakan regulatifnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Status lembaga nasional yang diberi mandat untuk mengurusnya pun ditingkatkan dari **Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa** yang dipimpin oleh pejabat eselon IIB menjadi **Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa** yang dipimpin oleh pejabat eselon IB.

Bahasa Indonesia telah menjadi jati diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi salah satu identitas dominan bangsa Indonesia. Hal itu sejalan dengan ungkapan “Bahasa menunjukkan bangsa” yang tetap berlaku dan relevan dari zaman ke zaman. Ungkapan itu berguna untuk mengenali identitas seseorang, komunitas, atau bangsa. Entah mulai kapan ungkapan itu ada, ungkapan itu masih berlaku sampai sekarang. Dari bahasa yang digunakan penggunanya, identitas pengguna itu dalam arti luas dapat diidentifikasi. Dari bahasa dapat dikenali budaya dan karakter penggunanya. Pengguna bahasa dalam arti luas mencakup individu, satuan komunitas masyarakat ujar, satuan komunitas etnik dan sub-etnik, atau satuan komunitas bangsa. Oleh sebab itu, bahasa-bahasa yang serumpun, seperti bahasa Malaysia, bahasa Brunai Darussalam, dan bahasa Indonesia, menunjukkan kesamaan dan kemiripan budaya pemilik dan penggunanya, di samping menunjukkan perbedaannya.

Bangsa Indonesia beruntung memiliki tokoh-tokoh generasi yang berwawasan jangka panjang tentang masa depannya yang penuh dengan visi dan misi berdimensi futuristik tentang kebangsaan dan kenegaraan. Pada tanggal 28 Oktober 1928 para tokoh generasi muda saat itu melakukan sumpah, bukan sekadar janji, yang dikenal dengan **Sumpah Pemuda**. Tiga isi sumpah yang mencakup bangsa, tanah air, dan bahasa ternyata merupakan persyaratan eksistensi sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, yakni tumpah darah atau tanah air, bangsa, dan bahasa, lengkap dengan nama “Indonesia” untuk ketiga persyaratan itu, sebagaimana terkandung dalam teks Sumpah Pemuda.

Pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia, para tokoh Pendiri Negara Republik Indonesia menindak lanjuti Sumpah Pemuda. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan adalah peristiwa nasional yang mahapenting sebagai titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia, sekaligus lanjutan peristiwa Sumpah Pemuda. Terkait dengan kepedulian terhadap kebutuhan bahasa nasional dan bahasa negara, para pendiri Bangsa dan Negara Indonesia ini telah mencantumkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa naegara dalam UUD 1945.



Dari peristiwa Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, dan tercantumnya Bahasa Indonesia pada Pasal 36 UUD 1945, tampak kecemerlangan para pelopor dan pejuang serta pendiri bangsa Indonesia dalam memprospek bahasa nasional dan bahasa negara sebagai kelengkapan bangsa dan negara. Pada era perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia, terbukti bahasa Indonesia telah menjadi kelengkapan kehidupan bangsa dan negara yang sangat penting. Dengan merujuk pandangan para sosiolinguis, Sneddon (2003:5) mengungkapkan pentingnya bahasa Indonesia itu sebagai berikut.

*The development of Indonesian as the sole of national language and one of the major unifying forces in Indonesia has been described by leading sociolinguist 'miraculous' process where by the population was successfully 'convinced that particular outside should become integrative, inter-ethnic, unifying tongue. It was an essential element, some say that most important element, in the integration of hundreds of ethnic groups into what is today the forth most populous nation in the world; 'perhaps the most important ingredient in the shaping of the modern Indonesian culture'.*

Dengan status dan fungsi strategis bahasa Indonesia dalam konteks bersama-sama dengan bahasa daerah dan bahasa asing, penguatan eksistensi itu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Perlu diketahui bahwa kehadiran Undang-Undang itu sudah lama diharapkan sebagai regulasi turunan dari Pasal 36 UUD 1945. Pada Bab II Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang itu tercantum kaitan antara Sumpah Pemuda dan Pasal 36 UUD sebagai berikut.

Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

Berdasarkan paparan tersebut, tampak bahwa secara yuridis formal bahasa Indonesia telah mendapatkan perhatian dalam kebijakan politik bahasa nasional. Dari paparan Alwai (2011:1--9), politik bahasa nasional itu telah menjadi pijakan yuridis formal dalam berbagai kebijakan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia serta bahasa daerah dan bahasa asing. Pada perkembangan kebijakan politik bahasa yang tidak terlepas dari eksistensi bahasa daerah dan bahasa asing, kebijakan politik bahasa itu berlanjut dengan bukti kelahiran regulasi-regulasi yang relevan yang berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri, sebagaimana tersebut berikut ini.

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara lainnya.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67/M-DAG/PER/II/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.



Di samping berupa regulasi tersebut, sebagai rujukan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sudah tersedia rujukan yang relevan, seperti (1) *Pedoman Pembentukan Istilah*, (2) *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, (3) *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, (4) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan kamus-kamus lain sesuai dengan ranah dan bidang yang terkait, dan (5) Senarai Peristilahan sesuai dengan ranah dan bidang yang terkait. Di samping itu, masih ada sejumlah panduan penggunaan bahasa Indonesia terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Masih ada juga karya para pakar Bahasa Indonesia yang berguna sebagai rujukan dan pedoman penggunaan Bahasa Indonesia.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, bahasa Indonesia telah lahir sebagai kesadaran perjuangan nasional dan terintegrasi dengan perjuangan kenegaraan dan kebangsaan. Hal tersebut terbukti dari isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan tercantumnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada Pasal 36 UUD 1945. Kedua, sebagai upaya tindak lanjut hasil perjuangan tersebut, dalam rangka pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia, telah ada kebijakan politik bahasa lanjutan yang relevan, yang terwujud dalam bentuk regulasi: undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan kebijakan lain yang relevan.

## **2. Internalisasi Bahasa Indonesia: Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan, dan Pemertabatan**

Dengan rujukan internalisasi sebagaimana dipaparkan di depan, internalisasi bahasa Indonesia berdimensi internal mencakup hal-hal berikut: (a) peningkatan kapasitas bahasa Indonesia sebagai sistem alat komunikasi, (b) pemberdayaan bahasa Indonesia dalam penggunaan, dan (c) pemertabatan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **a. Peningkatan Kapasitas Bahasa Indonesia**

Bahasa Indonesia sudah memiliki kapasitas yang layak sebagai sistem alat komunikasi bangsa dan masyarakat Indonesia. Sebagai sistem alat komunikasi, kelayakan kapasitas itu dapat dirunut pada komponen subsistem pembentuknya. Dengan demikian, kapasitas yang layak itu tersebar pada komponen-komponen pembentuk sistem, yakni komponen fonologis, komponen gramatikal, komponen kosakata dan istilah, serta komponen register dan ranah penggunaannya.

Dalam rangka penguatan sistem, ada perangkat bantu yang berlaku sebagai pedoman. Perangkat bantu itu adalah ketentuan tertulis sebagai rujukan. Rujukan tertulis itu adalah *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Sebagai perangkat bantu, ketentuan tertulis itu sebenarnya merupakan representasi kaidah yang diformalkan dalam bentuk tertulis. Kaidah yang tertuang dalam perangkat bantu itu sudah dikuasai oleh pengguna bahasa Indonesia yang berkompentensi layak.

Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa Indonesia telah berfungsi dan berperan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Sebagai bahasa nasional, sebagaimana diungkap oleh Muslich & Suparno (1987:5--6), bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2)



lambang identitas nasional, (3) alat komunikasi pemersatu bangsa, dan (4) alat komunikasi antaretnik. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia telah berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi dalam komunikasi pada tingkat nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, dan (2) bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.

Dalam perkembangan pada era kemajuan dan modernitas, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia bertambah. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa sehari-hari dalam komunikasi umum, bahkan sudah pula menjadi bahasa sehari-hari komunikasi keluarga. Kondisi demikian itu berawal dalam kehidupan komunitas perkotaan, tetapi kini sudah memasuki kehidupan komunitas perdesaan. Walaupun demikian, fungsinya sudah memadai, searah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebudayaan nasional yang dinamis, kapasitas bahasa Indonesia tetap perlu dijaga dan ditingkatkan, terutama pada komponen kosakata yang dinamikanya sangat tinggi. Peningkatan kapasitas pada komponen kosakata itu dilakukan untuk meningkatkan fungsinya yang memadai untuk menangkap dan mengungkap gagasan. Pada umumnya, penambahan kata pada kosakata baru berupa kata istilah. Untuk itu, sudah ada ketentuan sebagaimana tercantum dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*.

Dengan kapasitas yang memadai, bahasa Indonesia sudah dapat digunakan dalam berbagai ranah. Kalangan warga masyarakat yang memiliki kompetensi layak seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah dan bidang kehidupan apapun, tidak perlu berkeluh tentang kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin ada pengguna yang menyalahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sulit. Dalam kaitan itu, perlu dibedakan dua hal: bahasa Indonesia yang sulit atau pengguna bahasa Indonesia yang tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia secara memadai.

## **b. Pemberdayaan Bahasa Indonesia**

Dalam rangka pemberdayaan bahasa Indonesia, sejumlah perangkat kebijakan legal formal politik bahasa sudah terwujud dalam berbagai bentuk regulasi, yang secara rinci sudah dipaparkan di depan. Terwujudnya perangkat kebijakan itu sebenarnya sudah merupakan langkah konkret dalam pemberdayaan bahasa Indonesia.

Pemberdayaan bahasa Indonesia dalam perencanaan bahasa merupakan ranah pembinaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Moeliono (1981), kodifikasi bahasa dirumuskan untuk digunakan oleh pengguna bahasa. Dengan menganalog pengertian itu, maka ketentuan tentang penggunaan bahasa yang tercantum dalam regulasi kebijakan politik bahasa dihajatkan untuk pengguna dan penggunaan bahasa Indonesia.

Urusan klasik dan klise mengemuka ketika ada kelemahan pada tahap eksekusi kebijakan. Komitmen pada pemegang mandat pelaksana regulasi tentang kebijakan politik bahasa cenderung lemah. Berdasarkan pengalaman menindaklanjuti program kegiatan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan program-program kegiatan balai bahasa, ada kecenderungan program-program bidang kebahasaan dan kesastraan bukanlah program prioritas. Bahkan, program kebahasaan dan kesastraan lazim tidak mendapatkan alokasi dana dari





pemerintah daerah setempat. Kalau ada alokasi dana, usulan dana beserta urusannya harus dilewatkan jalur pesan yang sering tidak formal.

Kondisi tersebut sebenarnya ironis. Berdasarkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang sangat penting dan strategis, pemberdayaan bahasa Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan tidak mendapatkan perhatian. Untung tidak ada sanksi pidana ketika peraturan kebijakan bahasa tidak dilaksanakan, alih-alih dilanggar.

Paparan tentang lemahnya komitmen dan perhatian terhadap kebijakan politik bahasa tidak perlu berlanjut. Dalam rangka itu, peran pemerintah pusat yang operasionalnya dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu ditingkatkan. Kebijakan politik bahasa akan terealisasi jika ada pengawasan yang kuat dan ketat. Bahkan, di setiap kantor pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II seharusnya ada tenaga kebahasaan & kesastraan sebagai perpanjangan tangan yang mengikuti pemberdayaan bahasa Indonesia pada tataran eksekusi di daerah, termasuk yang direkrut melalui penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Masih ada pemberdayaan yang tetap terjaga, yakni penggunaan Bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan masih terjaga, yakni sebagai bahasa pengantar interaksi kegiatan belajar-mengajar, sejalan dengan fungsinya sebagai bahasa komunikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Di dalam ranah itu pula standardisasi dapat dilakukan dengan mudah. Dalam ranah itu pula keberdayaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu dapat dibangun dengan jelas, terarah, dan tepat sasaran.

Dalam ranah pendidikan itu, seharusnya fungsi bahasa Indonesia dan penggunaannya untuk membangun karakter dan kompetensi keilmuan siswa dan mahasiswa dapat dimaksimalkan. Untuk itu, kualitas bahasa guru dan tuturan guru (*teachers talk*) merupakan andalan pembangunan karakter dan kompetensi keilmuan. Dengan bahasa guru yang memadai, karakter dan kompetensi pemelajar dapat diurus secara langsung atau tidak langsung. Guru yang mendapatkan mandat untuk tujuan demikian itu tidak terbatas guru mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga guru mata pelajaran yang lain.

Pemberdayaan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan mendasarkan fenomena budaya berbahasa yang terlepas dari regulasi kebijakan politik bahasa. Namun, dengan pertimbangan budaya berbahasa itu, pemberdayaan bahasa Indonesia tidak akan bertentangan dengan regulasi. Berdasarkan pendekatan demikian itu, dengan memperhatikan pendapat Suparno (2009), dapat diajukan pemberdayaan dengan kiat-kiat berikut: (1) penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, (2) penggunaan bahasa Indonesia dengan percaya diri, (3) penggunaan bahasa Indonesia dengan santun, (4) penggunaan bahasa Indonesia yang kreatif dan inovatif, dan (5) penggunaan bahasa Indonesia yang terpelajar.

### **c. Pemertabatan Bahasa Indonesia**

Dengan kedudukan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional beserta fungsinya yang terkait dengan kedudukan itu, bahasa Indonesia sudah menempati posisi terhormat. Posisi dan fungsi demikian itu sangat prestisius. Tidak keliru jika dengan posisi dan fungsinya itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terhormat dan bermartabat.



Kemartabatan bahasa Indonesia ternyata tidak cukup dengan statusnya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ada kondisi yang diperlukan untuk mengangkat bahasa Indonesia itu bermartabat. Kondisi yang paling ekstrem adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai “penentu nasib”. Misalnya, pejabat publik harus lulus Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).

Dalam dunia pendidikan sudah ada upaya pemartabatan bahasa Indonesia. Pertama, terkait dengan kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di lembaga pendidikan, di samping sebagai bahasa pengembangan kebudayaan nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Proporsi jam pelajaran di sekolah dalam Kurikulum 2013 dinaikkan dua kali lipat. Di Pendidikan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, mata kuliah Bahasa Indonesia termasuk satu di antara tiga mata kuliah wajib universitas: Agama, Pancasila, dan Bahasa Indonesia.

Upaya pemartabatan bahasa Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk penghargaan. Misalnya, penghargaan kepada pejabat publik yang tampilan tuturan lisannya memenuhi standar kaidah baku bahasa Indonesia. Menko Polkam Soesilo Bambang Yudoyono pernah mendapatkan penghargaan itu, yang diterimakan pada acara Kongres Bahasa Indonesia. Tradisi pemberian penghargaan tersebut perlu dilanjutkan sebagai upaya untuk menyediakan penutur rujukan contoh/model. Terkait dengan kemampuan bertutur ragam baku, Garvin & Mathiot (dalam Moeliono (1981:110), membedakan empat fungsi yang didukung bahasa baku, yakni (1) fungsi pemersatu, (2) fungsi pemberi kekhasan, (3) fungsi pembawa wibawa, dan (4) fungsi sebagai kerangka acuan.

Ada kondisi paradoksal, yakni kondisi yang bertentangan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bermartabat. Paparan berikut berisi kondisi tidak harmonis atau tidak sejalan dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia (Suparno, 2009).

- 1) Masih ada kalangan masyarakat yang bersikap negatif terhadap bahasa Indonesia. Sikap negatif itu tampak pada fenomena-fenomena berikut: (1) tidak merasa bangga memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, (2) menganggap bahasa Indonesia bukan kebutuhan yang dominan dalam kehidupan, dan (3) lebih menghormati bahasa asing daripada bahasa Indonesia.
- 2) Dampak dari sikap negatif terhadap bahasa Indonesia tersebut adalah kondisi yang kurang menguntungkan dalam praktik pemberdayaan bahasa Indonesia sebagai kebutuhan kehidupan, termasuk sebagai bahasa yang memberikan manfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3) Masih terdapat kalangan masyarakat yang kurang, bahkan tidak bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa resmi negara.

Kondisi negatif tersebut harus segera diatasi dengan langkah konkret yang berdampak besar dalam memartabatkan bahasa Indonesia. Salah satu langkah konkret yang strategis adalah penggantian kata asing yang populer di masyarakat, seperti penggunaan kata *united* pada nama organisasi sepak bola yang berkembang dalam dasawarsa terakhir ini. Kata tersebut seharusnya diganti dengan kata **persatuan**, sebagaimana dalam penggunaan yang sudah lazim seperti pada nama-nama berikut: **Persatuan Sepak Bola Surabaya (Persebaya)**, **Persatuan Sepak Bola Bandung (Persib)**, **Persatuan Sepak Bola Balik Papan**



(**Persiba**), dan lain-lain. Dengan pengubahan dan perubahan itu, ada kondisi sosiopsikologis yang terurus, yakni pananaman sikap mengutamakan unsur bahasa Indonesia daripada unsur bahasa asing.

### **3. Internasionalisasi Bahasa Indonesia dalam Era Global**

Era global ditandai oleh terbentuknya komunitas global atau komunitas internasional yang tidak terkendala oleh batas-batas wilayah kedaulatan bangsa dan negara. Komunitas global terbentuk melalui dua alternatif. Alternatif pertama adalah migrasi, yang memungkinkan secara fisik sejumlah warga negara berpindah dari negaranya dan bertemu serta membentuk suatu komunitas. Alternatif kedua adalah kontak komunikasi dan interaksi berbasis web atau media sosial yang memungkinkan sejumlah orang berinteraksi dalam kondisi berjarak secara geografis.

Era global telah melahirkan insan-insan warga komunitas era global atau komunitas internasional. Mereka memiliki kemampuan untuk menempatkan diri sebagai warga komunitas era global berdasarkan kemampuannya berkomunikasi dan berinteraksi dengan bahasa alat komunikasi lintas bangsa dan negara. Kondisi dan tuntutan demikian itu menjadi keniscayaan bagi warga bangsa yang memasuki kapasitas berinteraksi internasional.

Setiap bangsa dan negara serta warganya memiliki kepentingan dalam era global itu. Kepentingan apapun, satu jalur strategis yang ditempuh adalah internasionalisasi bahasa. Dengan internasionalisasi bahasa, banyak kepentingan yang dapat diperoleh, seperti penandaan identitas diri, pemberian pengaruh, promosi, kerja sama, dan lain-lain.

Paparan di atas sekadar rasionalitas perlunya internasionalisasi bahasa Indonesia dalam era global sebagai cakupan perencanaan bahasa. Di samping itu, ada landasan yuridis formal untuk memprospek bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi internasional. Sebagaimana terungkap pada Bab VII Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 204, Pemerintah telah mengamanatkan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan daya saing bangsa. Peningkatan fungsi itu dilakukan melalui alternatif upaya-upaya berikut: (1) penggunaan bahasa Indonesia di forum-forum internasional; (2) penggunaan program pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing atau penutur asing; (3) peningkatan kerja sama kebahasaan dan kesastraan dengan pihak-pihak luar negeri; (4) pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri; dan/atau (5) upaya lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebenarnya sudah cukup banyak program pembelajaran bahasa Indonesia bagi orang asing yang sudah berlangsung dalam beberapa dekade dan lahir sebagai program alamiah yang tidak termasuk cakupan perencanaan bahasa. Misalnya, pembelajaran bahasa Indonesia di Departemen Pertahanan Australian telah dilakukan oleh pihak Australia mulai tahun 1957 (Susanto, 2018). Bahkan, di Australia itu bahasa Indonesia diajarkan mulai kelas 1 sekolah dasar sampai kelas 10 sekolah menengah umum.

Internasionalisasi bahasa Indonesia menjadi keniscayaan, tidak perlu ditawarkan. Dengan internasionalisasi bahasa Indonesia itu, akan banyak kepentingan dan keberuntungan (*benefit*) yang dapat diraih. Bagi bangsa Indonesia,



internasionalisasi bahasa Indonesia menjadi upaya tidak hanya untuk mengukuhkan jati diri dan daya saing bangsa dengan identitas nasional bahasa Indonesia, tetapi juga keberuntungan dalam berbagai bidang, terutama yang dapat dilakukan dengan skema kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi.

Internasionalisasi bahasa Indonesia sebagai bagian perencanaan bahasa dapat dilakukan melalui dua kategori kiat. Kiat pertama adalah program penguatan terhadap program-program yang selama ini telah menjadi jalur internasionalisasi bahasa Indonesia. Kiat kedua adalah program inovatif dalam bentuk pengembangan program-program baru yang memungkinkan internasionalisasi bahasa Indonesia menjadi lebih produktif.

## PEMBAHASAN

### 1. Program Penguatan

Kiat melanjutkan program-program yang sudah terlaksana dilakukan dengan upaya-upaya peningkatan, baik peningkatan kualitas maupun peningkatan kuantitas, dan penguatan pemberdayaan. Dalam peningkatan kualitas, ranah akademik selalu terbuka untuk mendapatkan sentuhan kualitas. Misalnya, dalam peningkatan kualitas pembelajaran di suatu institusi asing, kerjasama antar universitas dapat dilakukan, termasuk bidang pembelajaran bahasa Indonesia, pengkajian, dan penelitian bersama. Buku ajar BIPA yang merupakan karya besar Badan Bahasa dapat ditawarkan kepada lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri.

Pertukaran dan pengiriman dosen berskema kerja sama merupakan program yang sangat lazim. Pertukaran dosen dan mahasiswa menjadi program saling menguntungkan ketika dua universitas yang bekerja sama memiliki program yang komplementer. Misalnya, kerja sama antara UM dan Guangxi Normal University termasuk kerja sama yang demikian itu. UM memiliki Program Studi Mandarin dan Guangxi Normal University memiliki Program Studi *Indonesian Studies*.

Secara kualitatif dan kuantitatif, pembukaan program studi seperti *Indonesian Studies* dan organisasi pengembang program BIPA yang terkait dengan internasionalisasi bahasa Indonesia perlu dilanjutkan. Untuk tujuan itu, keberadaan Atase Pendidikan dan Kebudayaan dapat memfasilitasi komunikasi untuk pengembangan program-program tersebut. Diharapkan dengan fasilitasi itu terbuka kemungkinan pendirian program studi dan organisasi baru pelaksana BIPA di luar negeri.

Realisasi program *in country* layak disambut dengan layanan yang memadai demi peningkatan kualitas tersebut. Salah satu skema layanan adalah penempatan seorang mahasiswa asing dalam keluarga Indonesia agar selama di rumah orang tua asuh mahasiswa asing itu dalam praktik menggunakan bahasa Indonesia. Semakin intensif interaksi mahasiswa asing dengan orang tua asuh dan keluarga, semakin intensif pula mahasiswa asing itu belajar menggunakan bahasa Indonesia. Di samping itu, pendampingan oleh tutor yang berstatus mahasiswa memungkinkan interaksi berbahasa Indonesia menjadi lebih intensif karena kesetaraan status yang memungkinkan komunikasi lebih terbuka.

Sebagai program akademik, peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia sudah diupayakan melalui forum berbagi pengalaman. Pemberdayaan forum-forum ilmiah berskala nasional, regional, dan internasional patut dihargai dan diapresiasi sebagai salah satu



kegiatan internasionalisasi bahasa Indonesia. Forum-forum akademik itu dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Program BIPA merupakan program andalan internasionalisasi bahasa Indonesia. Sebagai program akademik tentu lazim mendapatkan sentuhan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas. Daya tarik BIPA bagi negara-negara peminat BIPA menunjukkan perkembangan yang positif dari waktu ke waktu. Hal itu tampak dari permintaan pengajar BIP dari berbagai negara. Dari media sosial *REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA*, terungkap informasi bahwa di antara negara-negara ASEAN, Thailand merupakan negara yang paling banyak menerima kiriman pengajar bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Dengan mengutip pernyataan seorang pejabat otorita yang terkait, dberitakan bahwa ada 30 pengajar yang dikirim ke-17 lembaga BIPA di Thailand dengan jumlah pemelajar mencapai 2.752 orang.

Dari sumber informasi tersebut, juga terungkap adanya pengiriman pengajar BIPA ke berbagai negara. Dalam kaitan itu, Dadang Sunendar, Kepala Badan Bahasa, menyatakan bahwa kebutuhan pengajar BIPA terus meningkat. Pada tahun 2016 pengiriman pengajar BIPA dilakukan ke-47 lembaga BIPA di berbagai negara. Sampai tahun 2016 sudah ada 250 lembaga penyelenggara BIPA di berbagai negara di lima benua. Dari sumber medsos yang sama, juga terungkap kurangnya pengajar BIPA di luar negeri. Di Myanmar, misalnya, selama 2016 ada 1.125 pemelajar dengan jumlah pengajar hanya empat orang.

Prestise Program BIPA dapat dilihat dari perkembangan BIPA di Amerika Serikat. Sebagaimana dipaparkan oleh Susanto (2018), di Amerika Serikat ada 18 universitass penyelenggara BIPA. Di antara 18 universitas itu adalah (1) Arizona State University (ASU). (2) Cornell University, (3) Northern Illinois University, (4) Ohio University, (5) University of California at Berkeley, (6) University of California at Los Angeles, (7) University of Hawaii, (8) University of Michigan, (9) University of Washington, (10) University of Wisconsin at Madison, (11) Yale University, (12) John Hopkins University, (13) University of Colorado at Denver. Selain itu, ada beberapa organisasi non-profit yang secara rutin menyelenggarakan pembelajaran BIPA di Indonesia dengan label-label berikut: (1) SEASSI (*Southeast Asian Studies Summer Institute*) di Univ Wisconsin USA, (2) COTI (*Consortium of Teaching Indonesian*) di UKSW Salatiga, (3) USINDO (*United State-Indonesia*) di UGM dan Sanata Darma, (4) CLS (*Critical Language Scholarship*) di UM, (5) CLI (*Critical Language Institute*) di Universitas Ngurah Rai Bali, (6) IFLI (*The Indonesian Flagship Language Initiative*) di UM, dan (7) IOP (*Indoneseian Overseas Program*) di UM. Dilihat dari universitas-universitas di Amerika Serikat dan lembaga-lembaga non-profit yang telah melaksanakan program BIPA beserta jumlah dan jenis program BIPA yang dilaksanakan dengan kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia, tampak bahwa program BIPA merupakan program yang prestisius dan menjadi andalan dalam internasionalisasi bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa peserta program BIPA dari Amerika Serikat itu berasal dari berbagai negara luar Amerika Serikat sehingga internasionalisasi bahasa Indonesia melalui kerja sama dengan berbagai program BIPA Amerika Serikat dapat menjangkau jumlah negara yang lebih banyak. Di antara alumni BIPA tersebut ada yang menjadi pionir pelaksana BIPA di negaranya.



Sejumlah perguruan tinggi yang sudah memiliki Program BIPA atau program yang terkait dengan upaya menarik minat bagi penutur asing mempelajari bahasa Indonesia perlu menempatkan program yang demikian itu dalam konteks internasionalisasi bahasa Indonesia. Dengan kebijakan demikian, keberadaan BIPA dan sejenisnya akan menjadi salah satu andalan dalam upaya internasionalisasi bahasa Indonesia.

Ada contoh tentang pengembangan Program BIPA di Universitas Negeri Malang yang menunjukkan kemajuan secara bertahap. Dengan perencanaan program BIPA maju berlanjut, ada hasil yang menunjukkan kemajuan bertahap itu. Berdasarkan jumlah peserta didik dan jumlah negara asal, diperoleh informasi yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel Perkembangan Jumlah Mahasiswa Program BIPA  
Universitas Negeri Malang Tahun 2014--2018

No.	Tahun	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Negara
1.	2018	275	53
2.	2017	193	51
3.	2016	128	39
4.	2015	50	16
5.	2014	22	13

Sumber: Subbagian Sistem Informasi Universitas Negeri Malang

## 2. Pengembangan Program Baru

### a) Program Inovatif

Program inovatif terarah pada dua substansi, yakni pengembangan sandi bahasa dan pemberdayaan media sosial elektronik berbasis web. Kedua hal itu dielaborasi pada paparan berikut.

Pengembangan sandi bahasa selalu terbuka untuk dilakukan. Sehubungan dengan itu, Moeliono (1981:27) menyatakan bahwa pengembangan sandi bahasa berupa kegiatan kodifikasi norma untuk tata ejaan, tata bahasa, kosakata, dan norma berbagai ragam yang memenuhi syarat kepadan yang dituntut oleh berbagai jenis wacana.

Dalam gramatika yang baku sangat sedikit kemungkinan pengembangan, kecuali pemberdayaan untuk pembentukan kompetensi gramatikal. Dalam rangka internasionalisasi diperlukan bentuk dan bentukan kata yang mempermudah proses belajar bagi pemelajar asing. Oleh sebab itu, dalam pembentukan kata dan istilah, ketika ada unsur dari bahasa donor, khususnya dari bahasa Inggris, perlu tersedia dua alternatif, yakni padanan bentuk adaptasinya dalam bahasa Indonesia sejauh adaptasi itu dapat dilakukan. Kata-kata produk bentukan adaptasi dapat mempermudah pemelajar asing dalam mempelajari bahasa Indonesia, sebagai mana tampak pada padanan-padanan berikut.

produk	-	hasil
donatur	-	penyumbang
inkuiri	-	penemuan
populer	-	terkenal
grup	-	kelompok
energi	-	tenaga
via	-	lewat/melewati



konten - isi  
input - masukan

Morfem akhiran {-ian}'penganut/aliran yang ditokohi (nama tokoh)' dari bahasa Inggris juga ada yang potensial untuk membentuk kata baru. Secara inovatif dan mungkin bisa produktif karena dapat bergabung dengan morfem bahasa Indonesia. Dengan morfem tersebut dapat dibentuk kata-kata seperti **Gusdurian, Sahalian, Habibian**, dan lain-lain. Dalam bidang linguistik bentuk **Bloomfieldian** dan **Firthian** termasuk sangat populer.

Program inovatif dalam bentuk aplikasi program informasi dan teknologi merupakan alternatif pengembangan sarana bagi pemelajar asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Layanan informasi kebahasaan berbasis web itu memiliki daya jangkau yang tak terbatas dan tidak terikat waktu dan tempat. Oleh sebab itu, pembelajaran berbasis web yang diikuti oleh pemelajar asing secara fleksibel menjadi salah satu pilihan layanan dalam internasionalisasi bahasa Indonesia.

Pemberian informasi kebahasaan berbasis web itu sudah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dengan tersedianya layanan itu, pemelajar bahasa Indonesia, termasuk pemelajar asing, dapat mengunduh informasi yang tersedia via web.

## **PENUTUP**

Bahasa Indonesia yang berakar bahasa Melayu Riau pada perkembangannya sebelum menjadi bahasa nasional dan bahasa negara merupakan bahasa *lingua franca* yang menjadi alat komunikasi komunitas majemuk. Berdasarkan statusnya itu beserta sebarannya yang luas di Nusantara, bahasa Melayu itu diangkat menjadi bahasa nasional dengan nama **bahasa Indonesia** dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penetapan bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda itu berlanjut pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, dengan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagaimana tercantum pada pasal 36 UUD 1945.

Untuk penguatan dan peningkatan kapasitas bahasa Indonesia, penggunaan, dan penggunanya, ada kebijakan politik kebahasaan dengan tiga kategori bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dengan kebijakan politik kebahasaan itu, rancangan pengembangan bahasa Indonesia dan pembinaan penggunaannya disusun dan dilaksanakan secara sistematis dan programatis. Dampak dari perlakuan itu jelas, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang memiliki kapasitas layak dalam fungsinya sesuai dengan kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kebijakan politik bahasa itu terwujud dalam bentuk regulasi dan tindakan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan bahasa.

Pada perkembangan era global, bahasa Indonesia memiliki fungsi tambahan sebagai alat komunikasi internasional. Walaupun demikian, bahasa Indonesia tetap memiliki jati diri sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sehingga penggunaannya sebagai dengan fungsi tambahan itu merupakan penandaan jati diri bangsa Indonesia. Secara alamiah pada era global itu telah berkembang program-program pembelajaran bahasa Indonesia dalam berbagai label. Program BIPA merupakan salah satu program versi akronim dalam bahasa Indonesia yang sudah terkenal.



Menghadapi perkembangan tersebut, diperlukan kebijakan yang diarahkan pada dua dimensi terhadap bahasa Indonesia, yakni dimensi internal dan dimensi internasional. Kedua dimensi itu tidak hanya perlu diakui, tetapi juga perlu diurus secara seimbang. Internalisasi merujuk pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia berdimensi internal atau nasional. Program dan kegiatan yang relevan adalah (1) peningkatan kapasitas bahasa Indonesia, (2) pemberdayaan bahasa Indonesia, dan (3) pemertabatan bahasa Indonesia. Sebaliknya, internasionalisasi merujuk pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia berdimensi internasional. Dari dimensi itu, program dan kegiatan internasionalisasi terarah pada penguatan terhadap program-program yang telah terlaksana untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi internasional. Di samping itu, diperlukan program inovatif yang memungkinkan internasionalisasi lebih produktif untuk mendukung fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. (2011). *Bahasa Indonesia: Pemakai dan Pemakaiannya*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Alwi, Hasan *et al.* (2003). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/04/05/onxyhx361->  
Unduhan tanggal 18 Oktober 2018
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146/U/2004 Tentang Penyempurnaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah.
- Lanin, Ivan. (2018). *Xenoglosifolia: Kenapa Harus Nginggris?*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Moeliono, Anton. M. (1981). *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Moeliono, Anton M. (1986). *Santun Bahasa*. Jakarta: Penerbit P.T. Gramedia
- Muslich, M. & Suparno. (1987). *Bahasa Indonesia: Kedudukan, Fungsi, Pembinaan, dan Pengembangannya*. Bandung: Jemmars
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67/M-DAG/PER/II/2013 Tentang Kewajiban Pencantuan Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara lainnya





- Sneddon, James. (2003). *The Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society*. Sydney: University of New South Wales University Press Ltd.
- Suparno. (2009). “Pemberdayaan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Peradaban Komunikasi Bangsa”. *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI)*. Batu, Indonesia, 5--7 November 2009
- Suparno. (2017). “Upaya Memartabatkan Bahasa dan Sastra Indonesia”. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Bertema Memartabatkan Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Menuju Insan Pancasila*. Media Centre Universitas Tadulako pada tanggal 28 Oktober 2017.
- Susanto, Gatut. (2018). “Pengokohan Eksistensi BIPA melalui Program Studi BIPA”. *Seminar BIPA UMP Purwokerto*, 14--15 September 2018
- Tim Penyusun. (2018). *Senarai Istilah Asing-Indonesia di Ruang Publik*. Surabaya: Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Tim Redaksi Lembar Komunikasi 1985—1994. (2001). *Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 1*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Tim Redaksi Lembar Komunikasi 1996—2002. (2011). *Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Wright, Sue. (2016). *Language Policy and Language Planning: From Nationalism to Globalization*. New York: Palgrave Macmillan.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 4 Kelompok 8**

Pembicara : Suparno  
Judul Makalah : “Internalisasi dan Internasionalisasi Bahasa Indonesia”  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 13.45—15.15  
Moderator : Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.  
Pencatat : Retno Handayani

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Bahasa Indonesia sekarang menjadi alat komunikasi era global yang diwarnai era teknologi yang canggih.
2. Potensi internalisasinya sudah terlihat dan potensi menjadi bahasa internasional semakin jelas dari penggunaan bahasa Indonesia yang menarik dan memenuhi berbagai forum internasional.
3. Kepadatan penggunaan bahasa Indonesia yang semula peringkat 17 menjadi peringkat 6 di media sosial berdasarkan data UNESCO. Artinya, bahasa Indonesia berkembang dalam dimensi yang luas.
4. Bahasa Indonesia bukan bahasa negara kuasa dan di ASEAN menjadi tarik menarik.
5. Obsesi kita adalah bahasa yang dipelajari haruslah bahasa yang dapat memberi peluang usaha.
6. Program BIPA dihentikan ke Timor Leste karena negara tersebut memberlakukan bahasa Melayu.
7. Penggunaan bahasa Indonesia di tingkat ASEAN masih butuh perjuangan, sehingga sulit bila menginternasionalkan bahasa Indonesia di dunia.
8. Untuk membuat bahasa Indonesia jaya di negeri sendiri saja masih tertatih, di sisi lain bahasa Indonesia di media sosial sudah berkembang pesat sampai pada identifikasi internasional, yaitu peringkat ke-6.
9. Internalisasi itu adalah pendekatan, metode, dan program-program internal dari bahasa Indonesia itu sendiri.
10. Bahasa itu sarana komunikasi, bukan pakaian jadi saya lebih suka penggunaan bukan pemakaian. Arah internalisasi bahasa Indonesia adalah *language development* dan pembinaan bahasa.
11. Generasi penerus perjuangan bangsa ini betul-betul bisa menghayati bahwa bahasa Indonesia adalah hidayah untuk bangsa ini. Bangsa Indonesia sudah memiliki kesadaran untuk mengangkat bahasa dengan label Indonesia adalah kesadaran yang luar biasa. Status bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional.
12. Langkah politik bahasa sudah dimulai sejak 28 oktober 1928 dan secara konsisten pemerintah Indonesia menindaklanjuti hal tersebut.
13. Objek internalisasi bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia itu sendiri, penggunaannya, dan penggunaannya.
14. Arah internalisasi adalah penguatan kapasitas, pemberdayaan, dan pemertabatan bahasa Indonesia.



15. Peningkatan kepatuhan terhadap kaidah penggunaan dan peningkatan peran kelembagaan dan optimalisasi penggunaan bahasa Indonesia.
16. Internalisasi itu tumbuh secara alamiah, terutama BIPA tumbuh sangat pesat.

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Ani Rahmawati  
Instansi : UNS

#### **Pertanyaan:**

Selama ini kita mengetahui bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi utama di Indonesia. Sesungguhnya tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga ekspresi dan berpikir. Sebagai alat ekspresi, bahasa Indonesia harus lebih dibiasakan untuk digunakan karena anak muda sekarang tidak terbiasa, seperti “*Oh my God. I’m sorry...*”. Bagaimana kita bisa meningkatkan bahasa Indonesia sebagai alat ekspresi.

#### **Jawaban:**

Komunikasi dalam arti luas, atau kalau disegmentasi, sekarang ini sudah harus dikembangkan menjadi bahasa pembentuk kepribadian. Ada korelasi kemahiran berbahasa dan kemahiran berpikir dan ada ukurannya, yaitu UKBI. Kalau guru tidak rapi menggunakan bahasa Indonesia, akan menjadi kebiasaan muridnya. Hal ini dikenal dengan *Language set of habits*. Jika tidak dibiasakan dengan baik, penggunaan bahasanya tidak terlatih. Guru harus menjadi andalan tidak hanya mata pelajaran bahasa Indonesia tetapi juga mata pelajaran lain. Tantangan kita membangun bahasa Indonesia sebagai sarana pembentuk kepribadian termasuk kecerdasan.

Bahasa diperoleh sejak bayi dilahirkan, tetapi Tuhan sudah menciptakan otak. Bayi menangis dengan bunyi vokal. Kisah tentang anak manusia yang dibesarkan oleh serigala, dia tidak berbahasa seperti manusia tetapi mengaum seperti serigala. Bahasa adalah alat berpikir kemudian dihasilkan dengan bunyi bahasa. Tidak bisa berpikir tanpa bahasa. Setelah berpikir diekspresikan dengan artikulator, baru setelah itu ada komunikasi.

#### **Penanya 2**

Nama : Alam Sudin  
Instansi : -

#### **Pertanyaan:**

Di dalam Sumpah Pemuda, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Belanda takut dengan hal itu. Mengapa waktu itu bisa?

#### **Jawaban:**

Peran bahasa menjadi alat berpikir dan ekspresi. Mereka yang pro pada penjajah atau Belanda disisihkan oleh mereka, tidak bisa berkumpul dengan Belanda. Jika orang dalam keadaan tersiksa, tertekan, biasanya kecerdasannya muncul. Anak yang manja hidupnya tidak berusaha kerja. Anak sekarang banyak dimanjakan



oleh teknologi, hal itu menjadikan anak malas. Tentang label Indonesia bagian dari perjuangan. Bagian dari kejuangan dan perjuangan.

### **Penanya 3**

Nama : Defina

Instansi : Dosen Bahasa Indonesia, IPB

### **Pertanyaan:**

Kekhawatiran saya sebagai dosen bahasa Indonesia yang mengajari siswa asing. Saya yakin punya kekuatan yang dahsyat mempengaruhi kebijakan politik Indonesia, kebijakan bahasa, dan budaya kalah dengan kebijakan politik. Bagaimana saya bisa memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai hal yang penting? Kiat-kiat apa supaya bahasa Indonesia tidak diremehkan?

### **Jawaban:**

Bahasa adalah hal yang bukan dipelajari begitu saja. Guru harus paham mata pelajaran bahasa Indonesia. Guru adalah sesuatu yang digugu dan ditiru. Bahasa Indonesia itu ilmu bukan hanya orang bisa bicara bahasa Indonesia.

Ada bahasa Indonesia menjadi mata kuliah umum. Dalam UUD No.12, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipelajari dari tiga mata kuliah umum. Pembentukan kepribadian mahasiswa dapat dibangun dari mata kuliah bahasa Indonesia.

### **Isu-Isu Penting:**

1. Bahasa Indonesia sekarang menjadi alat komunikasi era global yang diwarnai era teknologi yang canggih. Potensi internalisasinya sudah terlihat, dan potensi menjadi bahasa internasional semakin jelas dari penggunaan bahasa Indonesia yang menarik dan memenuhi berbagai forum internasional.
2. Ada korelasi kemahiran berbahasa dan kemahiran berpikir. Bahasa adalah hal yang bukan dipelajari begitu saja. Bahasa Indonesia itu ilmu bukan hanya orang bisa bicara bahasa Indonesia. Guru harus paham tentang ilmu bahasa Indonesia. Guru adalah sesuatu yang digugu dan ditiru. Guru harus menjadi andalan, tidak hanya guru mata pelajaran bahasa Indonesia tetapi juga mata pelajaran lain. Tantangan kita membangun bahasa Indonesia sebagai sarana pembentuk kepribadian termasuk kecerdasan.
3. Fungsi bahasa adalah alat komunikasi, sebelum komunikasi kita berekspresi, sebelum berkespresi adalah berpikir. Bahasa adalah alat berpikir. Ada penurunan sikap terhadap bahasa Indonesia sekarang.



#### 4. Promosi Badan Bahasa di Ruang Publik

Judul Paparan : Promosi Badan Bahasa di Ruang Publik

Pembicara : Ferdiansyah

Jabatan : Anggota Komisi X DPR RI

Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018

Pukul : 08.00—10.00

Moderator : Prof. Dr. Gufran Ibrahim

As-salamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Yang kami hormati, Pak Dadang Sunendar, Kepala Badan Bahasa.

Pak Abdul Khak, Pak Gufran, dan Narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bapak Ibu Peserta Kongres Bahasa Indonesia ke-11 yang berbahagia dan kami hormati. Terkait yang telah disampaikan oleh moderator mengenai Komisi X, sebenarnya banyak yang telah kami lakukan di Komisi X berkaitan dengan anggaran, tetapi ada beberapa hal yang ingin kami singgung dulu berkaitan dengan nanti penganggaran 2020 tempat di Bappenas bersama Kementerian Keuangan.

**Pertama**, harus ada perubahan atau kajian ulang mengenai tugas dan fungsi Badan Bahasa. Perubahan ini akan memengaruhi penganggaran, jumlah sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, dan sebagainya. Terkait dengan fungsi Badan Bahasa akan diperluas dikarenakan kita sudah sepakat pada 2045--100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia--bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa Internasional. Badan Bahasa perlu membuat peta jalan kebutuhan anggaran per tahun untuk mencapai tujuan tersebut. Tahun demi tahun kita mengumpulkan kosakata, idealnya harus 8.000 kosakata pertahun supaya bahasa Indonesia bisa mencapai target menjadi bahasa Internasional menurut Pusat Pengembangan Bahasa.

Mengenai SDM, Kita perlu mendiskusikan dengan Deputi Bidang ESDM di Menpan RD karena terkait dengan pamong bahasa ataupun tenaga penelitian di bidang bahasa. Kita ketahui konsentrasi Badan Bahasa pada bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing tidak akan jalan seiring dan senada apabila tidak diikuti penyiapan SDM. Jadi, salah satu rekomendasi kalau boleh kami usulkan dalam kongres ini adalah **menyiapkan SDM**. Dalam hal ini, terkait juga dengan penataan dan kesejahteraan SDM. Kesejahteraan itu tidak serta merta harus dalam konteks materi, tetapi termasuk apresiasi terhadap para pelaku bahasa.

**Kedua**, berkaitan dengan penganggaran dan lomba-lomba. Jadi, kami terima kasih kepada Badan Bahasa telah mengundang kami saat mengadakan kegiatan lomba-lomba. Kegiatan tersebut mendapat respons yang sangat luar biasa di daerah. Kami dan Badan Bahasa menyadari kegiatan lomba yang dilaksanakan belum memadai dari segi kuantitas maupun nilai hadiah yang diberikan.

**Ketiga**, optimasi lobi budaya. Teman-teman kita yang bertugas di luar negeri tentu harus dibekali substansi materi dan kemampuan melobi untuk meningkatkan /optimasi keterlibatan atase di bidang pendidikan dan kebudayaan khususnya bahasa Indonesia. Bagaimana pelibatan atase di bidang pendidikan dan



kebudayaan itu juga lebih optimal. Inilah yang menjadi titik konsentrasi yang ketiga sehingga target kita 2045 bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional dapat dicapai.

**Keempat**, terkait penggunaan bahasa terutama daerah kami, yakni Tasikmalaya dan Garut, masih banyak ditemukan penggunaan bahasa asing yang tidak tepat. Misalnya kita suka melihat tulisan *slow down* mendekati restoran. Badan Bahasa harus melakukan promosi keliling ke daerah-daerah memberikan pemahaman kepada kepala daerah supaya lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Dalam hal ini, turut mendukung dan menyukseskan bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional. Terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan patut disyukuri dan turut mendukung menginternasionalkan bahasa Indonesia. UU ini perlu ditindaklanjuti Badan Bahasa dengan memetakan pasal-pasal yang telah dan belum teranggarkan dengan baik. Kegiatan promosi keliling untuk menyosialisasikan ke masyarakat dan pemangku kepentingan kemungkinan akan menghabiskan 10—12 persen anggaran.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2019 ditargetkan 20 juta. Jika 20 juta wisatawan menginap rata-rata 3 hari dan disapa dengan sapaan “selamat pagi” selama masa menginap tersebut, maka wisatawan mancanegara dapat merekam sapaan dalam bahasa Indonesia itu dengan baik. Dengan demikian, banyak cara dan metode yang bisa dilakukan untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia.

**Terakhir**, berulang kali kami mengajak beberapa teman dan Kemendikbud serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk membantu menyosialisasikan tes potensi bahasa Indonesia. Selain bahasa Inggris, sebaiknya dalam lelang jabatan eselon 1 dan eselon 2 juga diadakan tes potensi adalah bahasa Indonesia. Inisiasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat presentasi para calon pejabat perlu dimulai dari eselon 1 dan 2 karena eselon 3 dan 4 cukup banyak. Dengan demikian, Badan Bahasa memiliki nilai tawar tinggi. Terima kasih.

Wa billahit-taufiq wal-hidayah

Wasalam



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

Judul : “Promosi Badan Bahasa di Ruang Publik”  
Pembicara : Ferdiansyah  
Jabatan : Anggota Komisi X DPR RI  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018  
Pukul : 08.00—10.00  
Moderator : Prof. Dr. Gufran Ibrahim  
Pencatat : Anita Ningrum dan Nadia Almira Sagitta

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Ada perubahan tentang tusi (tugas dan fungsi) Badan Bahasa juga perubahan mengenai struktur organisasi. Tusi akan berkaitan dengan penganggaran, jumlah SDM, struktur, dan lain-lain.
2. Terkait dengan itu, fungsinya akan diperluas pada 2045.
3. Perlu diskusikan dengan Menpan RB. Terkait dengan pamong bahasa ataupun tenaga penelitian di bidang bahasa.
4. Salah satu rekomendasi yang ingin kami usulkan adalah penyiapan dan kesejahteraan SDM.
5. Kesejahteraan tidak serta-merta materi, tetapi juga apresiasi sebagai pelaku bahasa. Ini juga untuk tenaga pendidikan di bidang kebahasaan.
6. Ternyata lomba-lomba mendapat respons luar biasa di daerah, tetapi hadiahnya kurang banyak dan jumlahnya kurang besar.
7. Pelibatan atase kita di luar negeri harus dibekali tidak hanya dalam konteks, tetapi juga lobi budaya.
8. Badan Bahasa perlu dibekali promosi keliling untuk memberikan pemahaman kepada kepala daerah demi mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional.
9. Target wisatawan 2019 adalah dua puluh juta orang. Seharusnya bisa mendukung mempromosikan bahasa Indonesia. Misalnya, menyemarakkan bahasa Indonesia di ruang publik.
10. Badan Bahasa perlu memetakan mana saja pasal dalam UU kebahasaan yang belum teranggarkan dan sudah teranggarkan dengan baik.
11. Jadikan UKBI sebagai prasyarat bagi tes potensi eselon 1 dan 2 agar punya nilai tawar.

**Isu-Isu Penting:**

1. Salah satu rekomendasi yang ingin kami usulkan adalah penyiapan dan kesejahteraan SDM.
2. Badan Bahasa perlu memetakan mana saja pasal dalam UU kebahasaan yang belum teranggarkan dan sudah teranggarkan dengan baik.
3. Jadikan UKBI sebagai prasyarat bagi tes potensi eselon 1 dan 2 agar bahasa Indonesia punya nilai tawar.
4. Membuat slogan Salam Bahasa.



## 5. Internalisasi dan Internasionalisasi Bahasa Indonesia

### CATATAN KONGRES BAHASA INDONESIA XI Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

#### Sesi 4 Kelompok 8

##### Judul

Judul	: Internalisasi dan Internasionalisasi Bahasa Indonesia
Pembicara	: Dendy Sugono
Hari, Tanggal	: Selasa, 30 Oktober 2018
Pukul	: 13.45—15.15
Moderator	: Drs. Imam Budi Utomo, M. Hum.
Pencatat	: Retno Handayani

##### Rangkuman Penyajian Makalah

1. Bagaimana kita dapat menghargai bahasa Indonesia kalau kita tidak mengenal sejarah.
2. Peran bahasa adalah alat perhubungan antar etnis, pemersatu perbedaan sosial budaya dan agama.
3. Menyatukan kewilayah berupa daratan, pernyataan sikap kebangsaan di atas suku-suku bangsa lain.
4. Kebijakan kita betul-betul datang bukan saat era kita merdeka, tetapi jauh sebelum itu.
5. Mampukah bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu? Pada Kongres Bahasa Indonesia di Solo Tahun 1938 membahas hal ini. Kemudian bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu, hasilnya yaitu perlunya penciptaan istilah dalam bahasa Indonesia, menginternasionalkan ejaan bahasa Indonesia, pendirian instituti yang mengurus penelitian kebahasaan dan kesastraan.
6. Fungsi bahasa adalah alat komunikasi, sebelum komunikasi adalah berekspresi, sebelum berekspresi adalah berpikir. Bahasa adalah alat berpikir.
7. Ada penurunan sikap terhadap bahasa Indonesia, yaitu fenomena sebagai bahasa perhubungan luas dalam masa lampau, mengapa sekarang tidak dapat.

##### Tanya Jawab

###### Penanya 1

Nama : Ani Rahmawati  
Instansi : UNS

###### Pertanyaan:

Selama ini kita mengetahui bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi utama di Indonesia. Sesungguhnya tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga ekspresi dan berpikir. Sebagai alat ekspresi, bahasa Indonesia harus lebih dibiasakan untuk digunakan karena anak muda sekarang tidak terbiasa, seperti “*Oh my God..I’m sorry...*”. Bagaimana kita bisa meningkatkan bahasa Indonesia sebagai alat ekspresi.





**Jawaban:**

Komunikasi dalam arti luas, atau kalau disegmentasi, sekarang ini sudah harus dikembangkan menjadi bahasa pembentuk kepribadian. Ada korelasi kemahiran berbahasa dan kemahiran berpikir dan ada ukurannya, yaitu UKBI. Kalau guru tidak rapi menggunakan bahasa Indonesia, akan menjadi kebiasaan muridnya. Hal ini dikenal dengan *Language set of habits*. Jika tidak dibiasakan dengan baik, penggunaan bahasanya tidak terlatih. Guru harus menjadi andalan tidak hanya mata pelajaran bahasa Indonesia tetapi juga mata pelajaran lain. Tantangan kita membangun bahasa Indonesia sebagai sarana pembentuk kepribadian termasuk kecerdasan. Bahasa diperoleh sejak bayi dilahirkan, tetapi Tuhan sudah menciptakan otak. Bayi menangis dengan bunyi vokal. Kisah tentang anak manusia yang dibesarkan oleh serigala, dia tidak berbahasa seperti manusia tetapi mengaum seperti serigala. Bahasa adalah alat berpikir kemudian dihasilkan dengan bunyi bahasa. Tidak bisa berpikir tanpa bahasa. Setelah berpikir diekspresikan dengan artikulator, baru setelah itu ada komunikasi.

**Penanya 2**

Nama : Alam Sudin

Instansi : -

**Pertanyaan:**

Di dalam sumpah pemuda, menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Belanda takut dengan hal itu. Mengapa waktu itu bisa?

**Jawaban:**

Peran bahasa menjadi alat berpikir dan ekspresi. Mereka yang pro pada penjajah atau Belanda disisihkan oleh mereka, tidak bisa berkumpul dengan Belanda. Jika orang dalam keadaan tersiksa dan tertekan biasanya kecerdasannya muncul. Anak yang manja hidupnya tidak berusaha kerja. Anak sekarang banyak dimanjakan oleh teknologi, hal itu menjadikan anak malas. Tentang label Indonesia bagian dari perjuangan. Bagian dari kejuangan dan perjuangan.

**Penanya 3**

Nama : Defina

Instansi : Dosen Bahasa Indonesia, IPB.

**Pertanyaan:**

Kekhawatiran saya sebagai dosen bahasa Indonesia yang mengajari siswa asing. Saya yakin punya kekuatan yang dahsyat mempengaruhi kebijakan politik Indonesia, kebijakan bahasa, dan budaya kalah dengan kebijakan politik. Bagaimana saya bisa memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai hal yang penting? Kiat-kiat apa supaya bahasa Indonesia tidak diremehkan?

**Jawaban:**

Bahasa adalah hal yang bukan dipelajari begitu saja. Guru harus paham mata pelajaran bahasa Indonesia. Guru adalah sesuatu yang digugu dan ditiru. Bahasa Indonesia itu ilmu bukan hanya orang bisa bicara bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia menjadi mata kuliah umum. Dalam UUD No.12, bahasa Indonesia



menjadi salah satu bahasa yang dipelajari dari tiga mata kuliah umum. Pembentukan kepribadian mahasiswa dapat dibangun dari mata kuliah bahasa Indonesia.

**Isu-Isu Penting:**

1. Bahasa Indonesia sekarang menjadi alat komunikasi era global yang diwarnai era teknologi yang canggih. Potensi internalisasinya sudah terlihat, dan potensi menjadi bahasa internasional semakin jelas dari penggunaan bahasa Indonesia yang menarik dan memenuhi berbagai forum internasional.
2. Ada korelasi kemahiran berbahasa dan kemahiran berpikir. Bahasa adalah hal yang bukan dipelajari begitu saja. Bahasa Indonesia itu ilmu bukan hanya orang bisa bicara bahasa Indonesia. Guru harus paham tentang ilmu bahasa Indonesia. Guru adalah sesuatu yang digugu dan ditiru. Guru harus menjadi andalan, tidak hanya guru mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga mata pelajaran lain. Tantangan kita membangun bahasa Indonesia sebagai sarana pembentuk kepribadian termasuk kecerdasan.
3. Fungsi bahasa adalah alat komunikasi, sebelum komunikasi kita berekspresi, sebelum berkespresi adalah berpikir. Bahasa adalah alat berpikir. Ada penurunan sikap terhadap bahasa Indonesia sekarang.



## 6. Penguatan Bahasa Indonesia melalui Penyerapan dan Pemadanan Istilah Asing pada Surat Kabar

### PENGUATAN BAHASA INDONESIA MELALUI PENYERAPAN DAN PEMADANAN ISTILAH ASING PADA SURAT KABAR

**Baharman**

Universitas Negeri Makassar  
baharman@unm.ac.id

#### **Abstrak**

Masalah yang diteliti pada makalah ini, yaitu (1) bagaimanakah bentuk penyerapan dan padanan istilah asing pada surat kabar? dan (2) bagaimanakah upaya penyerapan dan padanan istilah asing pada media massa (surat kabar) memperkuat bahasa Indonesia? Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk penyerapan dan padanan istilah asing pada surat kabar dan mendeskripsikan upaya penyerapan dan padanan istilah asing tersebut untuk memperkuat bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa penggunaan istilah asing berupa kata atau frase yang berwujud penyerapan dan berwujud pemadanan dalam penggunaan teks/wacana berbahasa Indonesia. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik, yakni baca, catat, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi data-data berupa kata atau frase istilah asing, kemudian diinterpretasikan berdasarkan parameter penyerapan dan pemadanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Setelah melakukan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi maka peneliti dapat menemukan kesimpulan penguatan bahasa Indonesia melalui penyerapan dan pemadanan istilah asing pada surat kabar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah istilah asing yang digunakan pada surat kabar sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dengan kaidah penyerapan melalui proses adaptasi, adopsi, penerjemahan, dan kreasi. Pemadanan istilah asing pada surat kabar menunjukkan bahwa perlu mendapat perhatian agar dapat memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa media. Standardisasi bahasa media seperti bahasa yang digunakan oleh surat kabar dalam memberikan informasi atau menyajikan berita, baik yang terkait pada ejaan, tata bahasa, maupun istilah asing yang perlu di-Indonesia-kan agar bahasa Indonesia menjadi lebih kuat dalam penggunaannya. Upaya konkret akan hal ini maka perlu dibuatkan buku atau senarai kumpulan penyerapan dan pemadanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi panduan bagi media massa, pers, atau lembaga penerbitan surat kabar dalam memilih dan menggunakan istilah yang sudah ditetapkan tersebut sebagai suatu panduan.

**Kata-kata kunci:** penyerapan, pemadanan, istilah asing, dan surat kabar

#### **Abstract**

*The formulations of the problem in this paper are (1) how the form of absorption and the equivalent of foreign terms in the newspapers? and (2) how the effort to absorb and match foreign terms in the mass media (newspapers) to strengthen*



*the Indonesian language? This paper aims to describe the form of the absorption and equivalent of foreign terms in newspapers and describes the efforts of the absorption and equivalent of the foreign term to strengthen the Indonesian language. The design of this research is descriptive qualitative. This research data is the use of foreign terms in the form of words or phrases tangible absorption and tangible matching in the use of text/ discourse in Indonesian language. Research data was collected using three techniques, namely read, record, and documentation. The data obtained were analyzed by identifying and classifying the data in terms of foreign words or phrases, then interpreted by the absorption and matching parameters of foreign terms into Indonesian language. After identifying, classifying, and interpreting, the researcher can find conclusions of strengthening the Indonesian language through the absorption and matching of foreign term terminology in the newspaper. The results show that a number of foreign terms used in newspapers have been absorbed into Indonesian language with the rules of absorption through the process of adaptation, adoption, translation, and creation. Matching of foreign terms to newspapers indicates that it needs attention in order to strengthen Indonesian language as a media language. Standardization of media languages such as the language used by newspapers in providing information or presenting news, whether related to spelling, grammar, or foreign terms that need to be in Indonesian for the Indonesian language becomes stronger in its use. Concrete efforts on this matter should be made a book or a list of foreign terms that have been absorbed and incorporated into the Indonesian language so that it becomes a guide for mass media, press, or newspaper publishing institutions in choosing and using the terms as a set as a guide.*

**Keywords:** *absorption, matching, foreign terms, and newspapers*

## **PENDAHULUAN**

Istilah asing seringkali digunakan dalam penggunaan bahasa Indonesia pada media cetak. Hal ini berdampak bagi eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, begitu pun sebagai bahasa nasional. Bangsa Indonesia terkesan merasa bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan menggunakan bahasanya sendiri. Menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulis, seolah dapat meningkatkan *prestise* seseorang dalam masyarakat. Tak dapat dipungkiri, dalam perkembangannya bahasa Indonesia selalu mendapatkan penambahan kosakata baru yang berasal dari berbagai ragam bahasa termasuk penambahan istilah. Salah satunya adalah istilah asing yang sering digunakan pada surat kabar.

Memadankan atau menerjemahkan istilah asing sering dilakukan oleh editor surat kabar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat atau pembaca. Media besar seperti surat kabar diharapkan memiliki editor bahasa yang berkompetensi di bidangnya. Pemadanan istilah asing yang perlu dilakukan editor adalah upaya dan langkah bijak editor untuk mendidik pembaca surat kabar yang tak terbatas pangsa pasarnya dengan jenjang pendidikan yang beragam. Hal yang dilakukan editor surat kabar dalam menyerap dan memadankan istilah asing adalah upaya untuk menjaga bahasa Indonesia agar tetap bermartabat. Editor surat kabar dapat menunjukkan adanya penguatan bahasa Indonesia melalui pemakaian



bahasa serapan dan padanan istilah asing di media massa cetak, khususnya surat kabar. Selain menganalisis penggunaan setiap kata serapan dan padanan istilah asing yang terdapat dalam teks berita surat kabar, peneliti melakukan padanan istilah tersendiri pada pemakaian kata-kata asing yang belum dilakukan surat kabar dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tindakan ini merupakan upaya untuk memperkuat penggunaan bahasa Indonesia pada media cetak surat kabar.

Penguatan bahasa Indonesia melalui penyerapan dan padanan istilah asing yang dilakukan surat kabar dapat dikategorikan ke dalam perencanaan *korpus* yang terdapat dalam teori bahasa yang dikemukakan oleh Haugen. Haugen (1966) perencanaan *korpus* “mengacu pada intervensi terhadap suatu bahasa, misalnya dengan cara menciptakan kosakata/istilah baru, memodifikasi yang lama, atau memilih bentuk-bentuk yang ada”. Penggunaan kata-kata serapan dan padanan istilah yang terdapat pada surat kabar merupakan kegiatan memodifikasi kata lama dari bentuk aslinya atau menciptakan kosakata baru sebagai bentuk padanan istilah asing.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis wacana pada surat kabar untuk mengetahui sejauh mana media cetak tersebut memiliki konsistensi dalam menggunakan bahasa serapan dan padanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Alasan penulis menggunakan surat kabar sebagai data penelitian dikarenakan surat kabar memiliki bahasa menarik dan menggunakan bahasa serapan serta padanan istilah asing dalam teks berita yang dimuatnya.

Masalah pada penelitian makalah ini, yaitu (a) bagaimanakah bentuk penyerapan dan padanan istilah asing pada surat kabar? dan (b) bagaimanakah upaya penyerapan dan padanan istilah asing pada media massa (surat kabar) memperkuat bahasa Indonesia? Dengan demikian, tujuan penulisan makalah ini adalah (a) mendeskripsikan bentuk penyerapan dan padanan istilah asing pada yang terdapat pada surat kabar dan (b) mendeskripsikan upaya penyerapan dan padanan istilah asing pada media massa (surat kabar) memperkuat bahasa Indonesia.

## **LANDASAN TEORI**

### **Penguatan Bahasa Indonesia**

Indonesia yang berkembang pada saat ini, tidak serta merta memiliki eksistensi yang kokoh manakala tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung yang memperkuatnya. Salah satu upaya memartabatkan bahasa Indonesia di dunia internasional, dapat terlihat melalui isi Sumpah Pemuda poin ketiga, “Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Selain itu, upaya penguatan bahasa Indonesia tidak akan terjadi apabila tidak ada sikap positif dari para penutur bahasa. Garvin & Mathiot (1968), ciri-ciri bersikap positif terhadap bahasa, antara lain; adanya kesetiaan bahasa (*language loyalty*) yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain; kebanggaan bahasa (*language pride*) yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat; dan kesadaran adanya norma bahasa (*awareness of the norm*) yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun.



Beragam cara dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam rangka memertabatkan bahasa Indonesia, salah satunya dengan penguatan bahasa. Upaya penguatan bahasa dapat dilakukan melalui media massa cetak, di antaranya melalui surat kabar. Koran atau surat kabar menampilkan informasi dari berbagai bidang ilmu yang biasanya mengusung penggunaan bahasa jargon (bahasa bidang keilmuan) pada teks informasi (berita) yang disampaikannya. Bahasa jargon biasanya membawa istilah asing yang hanya dimengerti oleh kalangan tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan yang bijaksana dari seorang editor penerbitan surat kabar dalam mengolah dan mengedit kalimat bermuatan kata istilah asing pada teks berita.

### **Penyerapan dan Pemandanan Istilah Asing**

Upaya kecendikiaan ilmuan (*scientist*) dan pandit (*scholar*) telah dan terus menghasilkan konsep ilmiah, yang pengungkapannya dituangkan dalam perangkat peristilahan. Ada istilah yang sudah mapan ada pula istilah yang masih perlu diciptakan atau perlu dikreasikan kembali, terutama yang berasal dari bahasa asing. Konsep ilmiah tersebut menjadi mapan karena dihasilkan oleh ilmuwan dan pandit Indonesia. Akan tetapi, sebagian besar konsep ilmu pengetahuan modern yang dipelajari, digunakan, dan dikembangkan oleh pelaku ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia datang dari luar negeri dan sudah dilambangkan dengan istilah bahasa asing. Hal ini pula yang kemudian diikuti oleh media seperti surat kabar dalam memberikan informasi dan pemberitaan.

Dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, didefinisikan bahwa istilah adalah kata atau frase yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan sedari tiga golongan bahasa yang penting, yakni (1) bahasa Indonesia, termasuk unsur serapannya dan bahasa Melayu, (2) bahasa nusantara yang serumpun, termasuk bahasa Jawa Kuno, dan (3) bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Pemandanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dilakukan melalui penerjemahan, penyerapan, atau gabungan keduanya. Dengan alasan keseragaman, sumber rujukan yang diutamakan ialah istilah Inggris yang pemakaiannya bersifat internasional karena sudah dilazimkan oleh para ahli di bidangnya. Penulisan istilah serapan itu dengan atau tanpa penyesuaian ejaannya berdasarkan kaidah fonotaktik, yakni hubungan urutan bunyi yang dizinkan dalam bahasa Indonesia. Penggunaan istilah asing oleh Kridalaksana (1985:55) memberikan dua mekanisme, (1) menerjemahkan dengan tidak mengubah makna ungapannya dan (2) meminjam istilah-istilah itu dengan menyesuaikan dalam bentuk ungapannya ke dalam bahasa Indonesia. Pada proses perkembangannya, bahasa Indonesia tidak terlepas dari penambahan kata-kata yang berasal dari istilah bahasa asing.

Sarwoko (2007:92) mengatakan bahwa masuknya istilah asing ke dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Ada dua perlakuan terhadap istilah asing ini, menyerap dan menerjemahkan atau memadankan, seperti kata *analysis* menjadi “analisis” atau kata *complementary* menjadi “komplementer”, kata *standard* menjadi “standar”.

Finoza (2013:48) menyebutkan bahwa berdasarkan taraf integritasnya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi dua golongan. Pertama, unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti *reshuffle*, *shuttle*



*cook, I exploitation de l'home par l'home.* Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur pinjaman yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Memadankan atau menerjemahkan istilah sering dilakukan pula oleh editor surat kabar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat pembaca.

### **Surat Kabar dan Bahasa Pers**

Manusia dalam kehidupannya tak terlepas dari kegiatan berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia bisa berbentuk lisan dan tulis. Komunikasi tertulis bentuknya bermacam-macam, salah satunya melalui media massa berbentuk surat kabar. Surat kabar merupakan alat komunikasi yang bersifat satu arah dan dua arah. Dikatakan komunikasi satu arah karena surat kabar dalam menyampaikan informasi kepada pembaca tanpa pembaca bisa berdialog secara langsung dengan surat kabar. Dikatakan komunikasi dua arah ketika surat kabar dalam menyampaikan informasi kepada pembaca, sesungguhnya pembaca bisa menyampaikan tanggapan kepada pembaca dalam bentuk tertulis yang biasanya termuat dalam rubrik surat pembaca.

Assegaf (1983:140), mendefinisikan surat kabar sebagai sebuah penerbitan yang berupa lembaran yang berisi berita-berita, karangan-karangan dan iklan, yang bahkan tanpa sekat bagi pembacanya. Jurnalistik tidak hanya berkecimpung dalam wilayah sosial politik tertentu, tetapi juga merambah semua aspek kehidupan masyarakat yang saling kait-mengait. Hal itu karena merupakan bagian dari aktivitas komunikasi sehingga perlu disampaikan melalui berita atau informasi tercetak seperti pada surat kabar. Jurnalistik erat sekali dengan bidang kemasyarakatan, pemerintahan, kebangsaan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, bahasa pers sesungguhnya dapat bergerak lebih leluasa bahkan menembus sekat-sekat tertentu sehingga dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat.

Kendala bahasa pers utamanya dalam cetak surat kabar sesungguhnya menjadi corong penulisan. Di dalam batas-batas tertentu kaidah-kaidah umum kebahasaan yang sedang berlaku harus diindahkan dan diperhatikan oleh media massa. Bahasa pers tidak lepas dari aturan atau kaidah-kaidah umum bahasa Indonesia yang berlaku saat ini. Ragam jurnalistik yang ada dalam wadah penulisan pers, tentu tidak secara serta-merta mengabaikan kaidah bahasa, aturan tata tulis, dan ejaan yang berlaku dalam penulisan bahasa Indonesia. Ketentuan-ketentuan kebahasaan dan kaidah-kaidah kebahasaan akan memberi ruang dan batasan serta hambatan kreasi tulis bagi pers dalam jurnalistik secara positif sehingga menciptakan sifat yang khusus atau ciri yang khas. Bahasa pers harus singkat, padat, sederhana, lugas, jelas, menarik, dan sistematis tidak lepas dari kaidah dan aturan kebahasaan.

Seorang jurnalis senior Rosihan Anwar (2004) menegaskan bahwa ragam bahasa jurnalistik itu harus didasarkan pada kaidah-kaidah bahasa baku yang kini berlaku. Dengan demikian, penggunaan bahasa pers dalam ragam jurnalistik sama sekali tidak boleh mengabaikan ketentuan-ketentuan tata bahasa baku dan kaidah-kaidah ejaan serta aturan tata tulis yang berlaku. Pelanggaran atas hal itu akan menjadikan kualitas bahasa media massa bersangkutan menjadi rendah martabatnya dan merosot harkatnya.



Dengan munculnya istilah-istilah diharapkan bahasa jurnalis tidak terkesan memaksakan menggunakan istilah tersebut. Gejala-gejala verbalistik kemungkinan akan menyulitkan pembaca media massa. Dari sudut pandang ini ragam bahasa jurnalistik cenderung lebih berpihak pada bahasa yang dipakai masyarakat. Bukan saja berada pada kata-kata yang digunakan dan dibuat linguistik, tetapi menghindari istilah asing dan diganti dengan bahasa Indonesia lebih diterima masyarakat kita sebagai pembaca media massa. Tak dapat dipungkiri usaha pers untuk memperkenalkan istilah asing. Akan tetapi, perlu bersikap hati-hati dengan kata-kata yang belum diterima masyarakat. Alih-alih untuk mencerdaskan, malah yang terjadi membingungkan.

Kata-kata atau istilah asing dapat saja digunakan dalam bahasa pers pada ragam jurnalistik bilamana tidak ada kata atau istilah yang lain dalam bahasa Indonesian. Namun, dalam penulisannya harus dengan cetak miring atau kursif. Bilamana dalam bahasa Indonesia terdapat kata atau istilah tertentu sebagai padanan dari bentuk istilah asing tersebut, gunakanlah bahasa Indonesia lalu diikuti dengan bentuk asingnya. Jadi, tidak lagi terjadi pembalikan urutan penulisan istilah atau kata asingnya dulu yang disebutkan pertama, baru kemudian dalam bahasa Indonesiannya.

## **METODE PENELITIAN**

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu penggunaan istilah asing, dengan dua subvariabel yaitu, penyerapan dan padanan istilah asing dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam surat kabar *Tempo*. Adapun desain penelitiannya adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik, yakni baca, catat, dan dokumentasi. Teknik baca digunakan secara dominan hampir dalam seluruh kegiatan pengumpulan data. Teknik ini digunakan untuk menandai istilah asing yang digunakan dalam buku surat kabar *Tempo*. Teknik catat digunakan untuk mendapatkan data tertulis. Peneliti berusaha mencatat beberapa istilah asing baik yang sudah diserap dan belum ada padanan atau akan dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Teknik yang ketiga, teknik dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan dokumen.

Adapun tujuan dokumentasi adalah untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu teks atau kutipan yang didokumentasikan menggunakan istilah asing. Analisis data dilakukan berdasarkan Saiddel (Moleong, 2012: 248) yang merujuk pada analisis data kualitatif sebagai berikut.

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri;
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya, berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.





## PEMBAHASAN

### Bentuk Penyerapan dan Pemadanan Istilah Asing pada Surat Kabar

Data penelitian ini adalah penggunaan istilah asing berupa kata atau frase yang berwujud penyerapan dan berwujud pemadanan dalam penggunaan teks/wacana berbahasa Indonesia. Sumber data penelitian ini adalah Surat Kabar *Tempo* edisi Senin, 23 Oktober 2017 No.5667 Tahun XVII, terdiri dari 32 halaman. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah kunci dalam penelitian ini, berikut ini disajikan parameter penelitian yang terkait pada dua hal, yakni penyerapan dan pemadanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Proses penyerapan dan pemadanan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dapat diakui bilamana memenuhi salah satu unsur di bawah ini.

1. Konotasinya cocok dengan istilah serapan yang dipilih.
2. Istilah serapan tersebut lebih singkat dibandingkan menggunakan terjemahan Indonesianya.
3. Istilah serapan yang dipakai dapat memudahkan tercapainya kesepahaman jika istilah Indonesia yang ada terlalu banyak sinonimnya.

Penyerapan dan pemadanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui empat hal, yaitu:

1. Mengadopsi

Cara ini dilakukan dengan mengambil bentuk dan makna kata asing tersebut secara menyeluruh bagi pemakai bahasa. Misalnya: *merger*, *laptop*, dan *mall*.

2. Mengadaptasi

Cara ini dilakukan oleh pemakai bahasa dengan hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Misalnya: *acculturation* menjadi 'akulturasi'.

3. Menerjemah

Cara ini dilakukan oleh pemakai bahasa dengan mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu, kemudian kata tersebut dicari artinya atau padanan dalam bahasa Indonesia. Misalnya: *gadget* menjadi 'gawai'.

4. Menkreasi

Cara ini dilakukan oleh pemakai bahasa dengan hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini hampir mirip dengan penerjemahan, tetapi tidak mesti bentuk fisiknya persis seperti cara penerjemahan. Sebagai contoh istilah dalam bahasa asing ditulis dalam dua atau tiga kata, sedangkan dalam bahasa Indonesia hanya ditulis satu kata. Misalnya, *spare parts* menjadi "suku cadang".

Pedoman penulisan unsur serapan secara jelas sudah termaktub di dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (PUEBI) edisi revisi berdasarkan Permendikbud RI No.50 Tahun 2016, bagian ke-4. Secara umum, parameter untuk mengukur padanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia menggunakan acuan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* edisi penyempurnaan berdasarkan Kepmen Diknas RI No.146 Tahun 2004 dan referensi/senarai padanan istilah asing dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Berdasarkan teknik pengumpulan data maka data yang diperoleh dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi data berupa kata atau frase istilah asing, kemudian diinterpretasikan berdasarkan parameter penyerapan dan pemadanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Setelah melakukan identifikasi,



klasifikasi, dan interpretasi maka peneliti dapat menemukan kesimpulan penguatan bahasa Indonesia melalui penyerapan dan pepadanan istilah istilah asing pada surat kabar.

**Tabel 1 Penyerapan Istilah Asing**

No.	Istilah Asing	Penyerapan dalam BI*)	Kaidah Penyerapan	Keterangan
1.	Exposure	Ekspose	Adaptasi	
	Pledoi	pledoi klien	Penerjemahan	Pembelaan
	Auditing	Auditor	Adaptasi	
2.	Attention	Atensi	Adaptasi	
	Budget	Bujet	Adaptasi	
	Moratorium	moratorium	Adopsi	
	Asse	Aset	Adaptasi	
3.	Project	Proyek	Adaptasi	
	Client	Klien	Penerjemahan	Pelanggan
	Investation	investasi	Adaptasi	
4.	Route	Trayek	Kreasi	
5.	Misscoordination	misskoordinasi	Adaptasi	
6.	Extra	Ekstra	Adaptasi	
7.	Inflation	inflasi	Adaptasi	
8.	Revision	Revisi	Adaptasi	
9.	Referendum	referendum	Adopsi	
10.	Illegal	Ilegal	Adaptasi	
11.	Project	Proyek	Adaptasi	



**Tabel 2 Padanan Istilah Asing**

No.	Istilah Asing	Padanan dalam BI	Kaidah	Keterangan
<b>Pemadanan</b>				
1.	Hub	Pusat	Penerjemahan	
2.	check-in	Mendaftar	Penerjemahan	
3.	community relation	Hubungan masyarakat	Penerjemahan	
4.	Fulus	Uang/duit	Penerjemahan	
5.	situs web	Laman	Kreasi	
6.	chairman-in-office	Kepala kantor	Kreasi	
7.	Effort	Upaya	Penerjemahan	
	Existing	Ada	Penerjemahan	
8.	Online	Daring	Kreasi	
9	residential threshold	*)	Penerjemahan	Ambang tinggal, tempat
	Reshuffle	Perombakan	Penerjemahan	
	artificial intelligence	Kecerdasan Buatan	Penerjemahan	
10	live sciense	*)	Kreasi	Hidup Sains
	Facebook	Facebook	Adopsi	
11	Game	Gim	Kreasi	Permainan
	Final	*)	Adopsi	Terakhir
12	canon ball	*)	Adaptasi	Bola kanon
	rising star	*)	Kreasi	Bintang yang bersinar
13	Neuro-Science	Ilmu saraf	Penerjemahan	
	volantilitas	*)	Adaptasi	Volantily
	year to date	*)	Penerjemahan	Sejauh tahun ini
	mont to mont	*)	Penerjemahan	Bulan ke bulan
14	Return	Kembali	Penerjemahan	
	Light rail transit (LRT)	*)	Kreasi	Transit kereta ringan
15	Touring	Tur	Adaptasi	
	sport fairing	Olah raga	Kreasi	
16	Powerful	Kekuatan Penuh	Penerjemahan	
	exit foll	Keluar lintasan	Kreasi	
17	Indoor	Dalam ruangan	Penerjemahan	
18	mass rapid transit (MRT)	Moda raya Terpadu	Kreasi	
19	Swafoto	Selfir	Kreasi	Memotret diri sendiri
20	zebra cross	Jalur pejalan Kaki	Kreasi	
	General Manager	*)	Adaptasi	General Manajer

Ket: \*) belum dipadankan ke dalam bahasa Indonesia



Pemadanan istilah asing sebagai upaya langkah bijak editor untuk mendidik pembaca surat kabar yang tak terbatas pangsa pasar serta jenjang pendidikannya. Sebagai contoh *busway* artinya ‘jalur bus’, *commuter line* artinya ‘jalur komuter’ atau ‘kereta komuter’. Sejumlah istilah asing yang digunakan pada surat kabar *Tempo* tersebar dalam 23 judul berita. Istilah asing yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia terdapat 18 istilah (tabel 1) dengan kaidah penyerapan di antaranya 13 istilah melalui proses adaptasi, 2 (dua) istilah melalui proses adopsi, 2 (dua) istilah melalui proses penerjemahan, dan 1 (satu) istilah melalui proses kreasi.

Berbeda halnya dengan pemadanan istilah asing pada surat kabar *Tempo* menunjukkan bahwa di antara 41 istilah asing yang digunakan, hanya 5 (lima) istilah asing yang ditemukan dan sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu: *situs/web* ‘laman’, *online* ‘daring/ dalam jaringan’, *reshuffle* ‘perombakan’, *MRT/mass rapid transit* ‘moda raya terpadu’, dan *selfie* ‘swafoto’. Selebihnya pada tabel 2 penulis memadankan ke dalam bahasa Indonesia dengan kaidah penerjemahan.

Jika dipersentasekan, istilah asing dalam surat kabar *Tempo* yang digunakan setelah mengalami kaidah penyerapan menjadi bahasa Indonesia (18 data), yakni hanya 30,5%. Selanjutnya, yang perlu mendapat perhatian pemadanan menjadi bahasa Indonesia, dalam hal ini masih utuh istilah asing (41 data), yakni 69,5%. Jumlah istilah asing (41 data) yang perlu dipadankan agar memperkuat bahasa Indonesia setelah direduksi dapat dipersentasekan, yaitu 87,80% (36 data dari 41 data). Selebihnya, hanya 12,20% (5 data) saja istilah dari bahasa asing benar-benar memiliki padanan pada bahasa Indonesia.

### **Upaya Penyerapan dan Padanan Istilah Asing pada Media Massa (Surat Kabar) Memperkuat Bahasa Indonesia**

Peranan media massa, baik media cetak maupun elektronik perlu ditingkatkan. Dalam kaitan ini, kesadaran dan tanggung jawab para wartawan dan jurnalis terhadap bahasa Indonesia perlu mendapat perhatian. Seperti diketahui bahwa hasil karya seorang wartawan menjadi anutan pemakai bahasa. Dengan bahasa Indonesia, mereka dapat menyampaikan perasaan dan pikirannya dengan sempurna dan lengkap kepada orang lain melalui berita dan informasi. Fenomena negatif yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia kaitan dengan pemakaian bahasa (Muslich, 2010: 38-39), antara lain.

- a. Banyak orang Indonesia memperlihatkan dengan bangga kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik.
- b. Banyak orang Indonesia merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing (Inggris), tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia.
- c. Banyak orang Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik.
- d. Banyak orang Indonesia merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing (Inggris) dengan fasih, walaupun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna.



Anggapan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang dipenuhi oleh kata, istilah, dan ungkapan asing merupakan bahasa Indonesia yang “canggih” adalah anggapan yang keliru. Masih banyak lagi jenis gejala negatif yang dapat diperlihatkan akibat kelemahan peristilahan dalam bahasa Indonesia. Namun, terlepas dari jenis gejala negatif lain yang belum diuraikan, menjadi perhatian penting bagi media massa, terutama surat kabar dalam mengambil bagian dalam meluruskan penggunaan istilah asing dalam bentuk penyerapan dan pepadanan dalam bahasa Indonesia. Hal ini akan memperkuat penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat pembacanya, sekaligus dapat memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.

Buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah, pada dasarnya sudah menggariskan ketentuan yang dapat dipakai untuk membentuk istilah yang seragam dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi. Di dalam buku tersebut, secara umum digariskan: (1) konsep-konsep dasar yang patut dipahami dalam rangka membentuk istilah, (2) sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan, (3) permasalahan ketatabahasaan peristilahan, (4) permasalahan semantik peristilahan, (5) permasalahan singkatan dan lambang, dan (6) permasalahan ejaan dalam peristilahan.

Berdasarkan hal tersebut, media surat kabar melalui editornya dapat menyaring istilah asing melalui penyerapan dan pepadanan istilah asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan cara penerjemahan langsung. Istilah Indonesia dapat dibentuk lewat penerjemahan berdasarkan kesesuaian makna tetapi bentuknya tidak sepadan. Misalnya, *supermarket* ‘pasar swalayan’ dan *merger* ‘gabungan usaha’. Penerjemahan dapat pula dilakukan berdasarkan kesesuaian bentuk dan makna. Misalnya, *bondedzone* ‘kawasan berikat’ dan *skyscraper* ‘pencakar langit’. Penerjemahan istilah asing bagi media massa (surat kabar) dalam meneruskan informasi dan berita memiliki beberapa keuntungan. Selain memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan sinonim, istilah terjemahan juga meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia.

Cara penerjemahan selain secara langsung, dapat pula dilakukan dengan perekaan. Inilah kemudian yang disebut pepadanan istilah asing. Proses kreatif sebagai upaya pepadanan istilah asing perlu dilakukan bagi insan pers dalam upaya menciptakan istilah baru. Istilah *factoring*, misalnya, sulit diterjemahkan atau diserap secara utuh. Dalam khazanah kosakata bahasa Indonesia/Melayu terdapat bentuk *anjak* dan *piutang* yang menggambarkan pengalihan hak menagih utang. Lalu direka istilah *anjak piutang* sebagai padanan istilah *factoring*. Begitu pula padanan *catering* menjadi ‘jasa boga’ dan *invention* menjadi ‘rekacipta’ diperoleh melalui perekaan.

Dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, diuraikan rambu-rambu penyerapan istilah asing untuk menjadi istilah Indonesia yang dapat dirujuk oleh bahasa pers (jurnalistik) dalam mengungkapkan istilah asing, yaitu;

1. Istilah asing yang akan diserap meningkatkan ketersalinan bahasa asing dan bahasa Indonesia secara timbal balik (*intertranslatability*) mengingat keperluan masa depan.
2. Istilah asing yang akan diserap mempermudah pemahaman teks asing oleh pembaca Indonesia karena dikenal lebih dahulu.
3. Istilah asing yang akan diserap lebih ringkas jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya.



4. Istilah asing yang akan diserap mempermudah kesepakatan antarpakar jika padanan terjemahannya terlalu banyak sinonimnya.
5. Istilah asing yang akan diserap lebih cocok dan tepat karena tidak mengandung konotasi buruk.

Istilah asing yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sah dan wajar saja, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi. Aturan yang dapat dipedomani, yaitu.

1. Istilah asing ditulis miring. Hal ini menandakan bahwa kata tersebut istilah asing (bukan bahasa Indonesia).
2. Istilah asing dipakai sebagai bentuk memperhalus makna kata, seperti *cleaning service*. Kata tersebut dipandang halus dibandingkan memakai istilah tukang bersih.
3. Istilah asing yang dipakai jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan menghilangkan atau mengurangi makna dan arti sebenarnya. Contoh *Windows, Microsoft Office, Server, Client, Port*.
4. Istilah asing lebih tepat dalam mengungkap budaya-budaya asing yang dikenal, misalkan opera, drama, ballet dan lain-lain.
5. Penggunaan istilah asing, sepatutnya diikuti dengan terjemahan bahasa

Oleh karena itu, peran media surat kabar dalam menggunakan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia harus memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Upaya penyerapan dan padanan istilah asing pada surat kabar untuk memperkuat bahasa Indonesia seperti yang diungkapkan Listiyorini (2008) berikut ini.

- 1) Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa.
- 2) Dibutuhkan keteladanan dari para figur masyarakat atau media teladan yang berskala nasional yang dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam beritanya.
- 3) Pendidikan jurnalistik yang terkoordinir dan terorganisir dalam membangun budaya dan kebiasaan bahasa pers yang baik mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan.

Media massa memiliki andil yang besar bagi penguatan dan pemertabatan bahasa Indonesia. Kata dan istilah asing, sering dijumpai dalam media massa, seperti media surat kabar, radio, dan televisi. Media-media ini memiliki banyak pembaca, pendengar, dan pemirsa sehingga pengaruhnya juga besar di masyarakat. Oleh karena itu, media massa, terutama surat kabar menjadi salah satu mitra kerja yang penting dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia melalui penyebaran informasi dan berita. Dengan demikian, surat kabar menjadi ujung tombak dalam penyebarluasan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Akhirnya, pembinaan bahasa Indonesia melalui media massa sangat diperlukan dalam rangka menangkal informasi yang menggunakan kata dan istilah yang menyalahi kaidah bahasa Indonesia. Insan pers harus menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan kaidah dan aturan kebahasaan sehingga pemertabatan bahasa Indonesia tetap terjaga di masyarakat pada umumnya, dengan motto dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarkan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing”.



## PENUTUP

Masyarakat atau publik media massa menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah sarana, bahkan salah satu modal utama pekerja media dalam menjalankan tugas profesionalnya. Masyarakat media juga menyadari bahwa melalui produk yang dikemas dalam penggunaan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis memiliki andil dan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam memperkenalkan istilah asing dalam bahasa Indonesia. Pembentukan istilah baru dalam bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa asing seringkali disebut peng-Indonesia-an istilah. Ada banyak cara yang ditempuh dan telah diuraikan dalam pembahasan.

Dengan demikian, penelitian ini juga berhubungan dengan standarisasi sebuah bahasa yang digunakan oleh surat kabar dalam memberikan informasi atau menyajikan berita yang terkait pada ejaan, tata bahasa, dan istilah asing yang perlu di-Indonesia-kan agar bahasa Indonesia menjadi lebih kuat dalam penggunaannya. Upaya konkret akan hal ini, perlu dibuatkan buku atau senarai penyerapan dan pepadanan istilah asing dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi panduan bagi media massa, pers, atau lembaga penerbitan surat kabar. Selanjutnya, agar dibuat kebijakan yang mengikat berupa pelaksanaan panduan penulisan sebagai kontrol dan alat evaluasi. Akhirnya, simpulan makalah ini sebagai berikut.

1. Istilah asing yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dengan kaidah penyerapan melalui proses adaptasi, adopsi, penerjemahan, dan kreasi.
2. Pepadanan istilah asing pada surat kabar menunjukkan bahwa perlu mendapat perhatian agar dapat memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa media surat kabar.
3. Istilah asing dalam surat kabar yang digunakan setelah mengalami kaidah penyerapan menjadi bahasa Indonesia jumlah cukup banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, D.Y. (2009). *Analisis wacana kritis*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Amir, J. (2013). "Eksistensi istilah asing dalam penggunaan bahasa Indonesia, betulkah sebagai pendukung BI". *Makalah kongres bahasa Indonesia X*. Jakarta: Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kemdikbud.
- Assegaff, D.H. (1983). *Jurnalistik masa kini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chaer, A. (2010). *Bahasa jurnalistik*. Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. (2013). *Pembinaan bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Djuroto, T. (2000). *Manajemen penerbitan pers*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Don, M.F. (1989). *Analisa isi surat kabar-surat kabar Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Finoza, L. (2013). *Komposisi bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Diksi.
- Garvin, P.L. & Mathiot M. (1968). "The urbanization of the guarani language: problem in language and culture" dalam Chaer (ed.) 2004.
- Haugen, E. (1966). *Language conflict and language planning: The case of modern norwegian*. Cambridge: Harvard University Press.
- Haugen, E. (1966). *Construction and reconstruction in language planning: Ivaraasen's grammar*. Dalam *Word*, 2 (2): 188 – 207.
- Haugen, E. (1966). *Dialect, language, nation*. Dalam *American Anthropologist*, 68 (4): 922 – 935.



- Haugen, E. (1966). *Linguistic and language planning*. Dalam W. Bright (ed.). *Sociolinguistics: Proceedings of the vcla sociolinguistics conference*. The Huggue: Norton, hlm. 159: 190.
- Haugen, E. (1969). *Language planning, theory and practice*. Dalam A. Graur (ed.). *Actes due Xe Congres International des Linguistic Bucharest*. Bucharest: Editions de L'Academic de La Republique de Roumanic, 701 – 711.
- Kemdikbud. (2016). *Pedoman umum ejaan bahasa indonesia*.
- Kemdiknas. (2004). *Pedoman umum pembentukan istilah*.
- Kloos, H. (1969). *Research possibilities on group bilingualism: A Report*. International center for Research on Bilingualism, Quebec.
- Kridalaksana. H. (1985). *Tata bahasa dekskriptif bahasa indonesia: Sintaksis*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Listiyorini, A. (2008). “Eksistensi bahasa daerah dan bahasa indonesia sebagai alat komunikasi dalam persaingan global”. [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Ari\\_Listiyorini\\_Hum./MAKALAH\\_EKSISTENSI\\_BI-1.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Ari_Listiyorini_Hum./MAKALAH_EKSISTENSI_BI-1.pdf). Diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.
- Muslich, M. (2010). *Bahasa indonesia pada era globalisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahardi, K. (2011). *Bahasa jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ratnawati, A. (2013). “Pengaruh bahasa asing dalam perkembangan bahasa indonesia”. <http://ani-slowly21.blogspot.com/2013/01/pengaruh-bahasa-asing-dalam.html>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.
- Sarwoko, T.A. (2003). *Inilah Bahasa indonesia jurnalistik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sobur, A. (2001). *Etika pers, profesionalisme dengan nurani*. Bandung: Humaniora Utama Pers.
- Tim Sepuluh. (2015). *Senarai Bentuk asing dan padanannya dalam bahasa indonesia*: Bandung: BPPJB.
- Pelitaku. (2008). “Yuk, kurangi istilah asing”. [http://pelitaku.sabda.org/yuk\\_kurangi\\_istilah\\_asing](http://pelitaku.sabda.org/yuk_kurangi_istilah_asing). Diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.





**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 2 Kelompok 9**

Pembicara : Baharman  
Judul Makalah : “Penguatan Bahasa Indonesia melalui Penyerapan dan Pemadanan Istilah Asing pada Surat Kabar”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.00  
Moderator : Drs. Mustakim, M.Hum.  
Pencatat : 1. Triwulandari  
2. Winci Firdaus

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Istilah asing seringkali digunakan dalam penggunaan bahasa Indonesia pada media cetak. Hal ini berdampak bagi eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, begitu pun sebagai bahasa nasional.
2. Pemadanan istilah asing yang perlu dilakukan editor adalah upaya dan langkah bijak editor untuk mendidik pembaca surat kabar yang tak terbatas pangsa pasarnya dengan jenjang pendidikan yang beragam.
3. Penguatan bahasa Indonesia melalui penyerapan dan padanan istilah asing yang dilakukan surat kabar dapat dikategorikan ke dalam perencanaan *korpus* seperti menciptakan kamus dan sebagainya.
4. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis wacana pada surat kabar untuk mengetahui sejauh mana media cetak tersebut memiliki konsistensi dalam menggunakan bahasa serapan dan padanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia.
5. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu penggunaan istilah asing, dengan dua subvariabel yaitu, penyerapan dan padanan istilah asing dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam surat kabar *Tempo*.
6. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik, yakni baca, catat, dan dokumentasi.
7. Analisis data dilakukan berdasarkan Saiddel (Moleong, 2012:248) yang merujuk pada analisis data kualitatif sebagai berikut. 1) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri; dan 2) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya, berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari, dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, serta membuat temuan-temuan umum.
8. Jika dipersentasekan, istilah asing dalam surat kabar *Tempo* yang digunakan setelah mengalami kaidah penyerapan menjadi bahasa Indonesia (18 data), yakni hanya 30,5%. Selanjutnya, yang perlu mendapat perhatian pemadanan menjadi bahasa Indonesia, dalam hal ini masih utuh istilah asing (41 data),



- yakni 69,5%. Jumlah istilah asing (41 data) yang perlu dipadankan agar memperkuat bahasa Indonesia setelah direduksi dapat dipersentasekan, yaitu 87,80% (36 data dari 41 data). Selebihnya, hanya 12,20% (5 data) saja istilah dari bahasa asing benar-benar memiliki padanan pada bahasa Indonesia.
9. Masyarakat atau publik media massa menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah sarana, bahkan salah satu modal utama pekerja media dalam menjalankan tugas profesionalnya. Masyarakat media juga menyadari bahwa melalui produk yang dikemas dalam penggunaan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis memiliki andil dan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam memperkenalkan istilah asing dalam bahasa Indonesia. Pembentukan istilah baru dalam bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa asing seringkali disebut pengindonesiaan istilah. Ada banyak cara yang ditempuh dan telah diuraikan dalam pembahasan.
  10. Dengan demikian, penelitian ini juga berhubungan dengan standardisasi sebuah bahasa yang digunakan oleh surat kabar dalam memberikan informasi atau menyajikan berita yang terkait pada ejaan, tata bahasa, dan istilah asing yang perlu diIndonesiakan agar bahasa Indonesia menjadi lebih kuat dalam penggunaannya. Upaya konkret akan hal ini. perlu dibuatkan buku atau senarai penyerapan dan pepadanan istilah asing dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi panduan bagi media massa, pers, atau lembaga penerbitan surat kabar. Selanjutnya, agar dibuat kebijakan yang mengikat berupa pelaksanaan panduan penulisan sebagai kontrol dan alat evaluasi. Akhirnya, simpulan makalah ini sebagai berikut.
    - a. Istilah asing yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dengan kaidah penyerapan melalui proses adaptasi, adopsi, penerjemahan, dan kreasi.
    - b. Pepadanan istilah asing pada surat kabar menunjukkan bahwa perlu mendapat perhatian agar dapat memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa media surat kabar.
  11. Istilah asing dalam surat kabar yang digunakan setelah mengalami kaidah penyerapan menjadi bahasa Indonesia jumlah cukup banyak.

## **Tanya Jawab**

### **Penanya 1**

Nama : Meity  
Instansi : Badan Bahasa

### **Pertanyaan:**

Apakah objek penelitian hanya *Tempo*? Apakah yang dimaksud dengan kreasi dan rekacipta menurut Anda? Bagaimana pendapat Anda jika ada media berbeda satu kata terhadap sebuah konsep?

### **Jawaban:**

Dalam penelitian ini, objeknya surat kabar *Tempo*. Di dalam makalah ini ada proses adopsi, adaptasi, kreasi, dan penerjemahan. Dalam pembahasan makalah ini seorang editor dapat melakukan penerjemahan secara langsung melalui proses perakaannya, dan bisa jadi perakaan itu dapat diterima oleh pembaca. Apabila terdapat perbedaan media terhadap sebuah konsep maka kewenangan Badan



Bahasa untuk menengahi bahkan menentukan pedoman yang bakunya, bahasa apa yang akan dipilih, kemudian dibakukan oleh Badan Bahasa.

**Penanya 2**

Nama : Syakir  
Instansi : Tempo Online

**Pertanyaan:**

Media memiliki selingkung, apakah setiap selingkung yang dimiliki media itu bisa dikatakan menyalahi aturan?

**Jawaban:**

Lebih baik istilah asing tidak langsung diserap secara serta merta, harus dilakukan proses pemadanan sehingga tidak menyalahi aturan yang berlaku.

**Penanya 3**

Nama : Muhamad Rinjad  
Instansi : Unindra

**Pertanyaan:**

Bagaimana keefektifan padanan yang dibuat oleh media massa mampu diterima oleh masyarakat?

**Jawaban:**

Saat ini, yang menjadi corong penggunaan bahasa Indonesia yang baik adalah media massa. Oleh karena itu, penggunaan bahasa media massa harus baik agar menjadi pembiasaan dan adaptasi sehingga bahasa tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Pengambilan kata-kata baru biasanya melalui proses pemadanan, proses pemadanan biasanya lebih mudah dilakukan dan lebih cepat diterima oleh masyarakat.

**Penanya 4**

Nama : Sri Lestari Samosir  
Instansi : SMA Methodist Medan

**Pertanyaan:**

Apakah ada upaya dari kita untuk meningkatkan kualitas editor media tersebut?

**Jawaban:**

Salah satu upaya yang dapat dilakukan, yaitu melalui UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia). Insan pers dapat melakukan uji kemahiran dan pendidikan jurnalistik terkait dengan kaidah dan aturan kebahasaan. Kalau perlu dibagikan senarai bahasa asing ke insan pers, sehingga tidak terjadi kesalahan, dan diserahkan kepada masyarakat apakah kata tersebut diterima atau tidak.



**Isu-Isu Penting:**

1. Penguatan bahasa Indonesia melalui penyerapan dan padanan istilah asing yang dilakukan surat kabar dapat dikategorikan ke dalam perencanaan *korpus*.
2. Masyarakat atau publik media massa menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah sarana, bahkan salah satu modal utama pekerja media dalam menjalankan tugas profesionalnya.
3. Perlu dibuatkan buku atau senarai penyerapan dan pepadanan istilah asing dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi panduan bagi media massa, pers, atau lembaga penerbitan surat kabar.



## 7. Analisis Komponen Penilaian dalam Perencanaan Pengajaran Sastra Jenjang SMP di Kota Cimahi

### ANALISIS KOMPONEN PENILAIAN DALAM PERENCANAAN PENGAJARAN SASTRA JENJANG SMP DI KOTA CIMAH

**Saidiman, Rina Heryani, Erlinda Nofasari**  
erlindanofasari@gmail.com

#### Abstrak

Penelitian “Analisis Komponen Penilaian dalam Perencanaan Pengajaran Sastra Jenjang SMP di Kota Cimahi” dilatarbelakangi adanya kekhawatiran penulis terhadap perencanaan pengajaran yang dibuat oleh pendidik yang ada di sekolah jenjang SMP se-Kota Cimahi. Keberhasilan peserta didik sangat berpengaruh dengan keefektifan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik. Masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah aturan penyusunan komponen penilaian dalam rencana pengajaran sastra pada jenjang SMP di Kota Cimahi?, (2) apakah komponen penilaian yang dibuat oleh pendidik ada dalam perencanaan pembelajaran sastra pada jenjang SMP di Kota Cimahi?, (3) apakah unsur-unsur dalam komponen penilaian yang dibuat oleh pendidik ada dalam perencanaan pembelajaran sastra jenjang SMP di Kota Cimahi?, (4) bagaimanakah pendidik menyusun penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan dalam perencanaan pembelajaran sastra pada jenjang SMP di Kota Cimahi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) aturan penyusunan komponen penilaian dalam rencana pengajaran sastra pada jenjang SMP di Kota Cimahi; (2) komponen penilaian yang dibuat oleh pendidik ada dalam perencanaan pembelajaran sastra pada jenjang SMP di Kota Cimahi; (3) unsur-unsur dalam komponen penilaian yang dibuat oleh pendidik ada dalam perencanaan pembelajaran sastra jenjang SMP di Kota Cimahi; (4) penyusunan penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan dalam perencanaan pembelajaran sastra pada jenjang SMP di Kota Cimahi. Teori yang digunakan adalah teori penilaian, evaluasi, sastra, pengajaran sastra, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, dan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015. Hasil dari penelitian ini terdiri atas 20 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra dari 36 SMP negeri dan swasta di Kota Cimahi. Diantaranya, lima Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sastra Kurikulum 2006 dan 15 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra Kurikulum 2013. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sastra Kurikulum 2006, 80% RPP sastra yang sesuai dengan aspek penilaian Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, sedangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sastra Kurikulum 2013, 86% yang memiliki kelengkapan unsur dengan aspek penilaian sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.

**Kata-kata kunci:** penilaian, evaluasi, sastra, dan pengajaran sastra



### **Abstract**

*This research entitled “Analysis of assessment components in the teaching plan of literature to the junior high schools in Cimahi”. This research was grounded by the researcher’s concern towards the teaching plan made by the teachers of junior high schools in Cimahi. Students’ success was influenced by the effectiveness of teaching process carried by the teacher to their students. The problems in this study are; (1) what are the rules of composing the assessment component in the literary teaching plan at the Junior High School level in Cimahi ?, (2) Was the assessment component made by the teachers found in the teaching plan of literature for the junior high school level in Cimahi?, (3) Were the elements in the component of the assessment made by the teachers found in the teaching plan of literature for junior high schools in Cimahi?, (4) how do teachers develop the assessment of attitude, knowledge and skills in the literature teaching plan at junior high school in Cimahi? This research aims to describe: (1) The rules of composing the assessment component in the literary teaching plan at the Junior High School level in Cimahi, (2) The assessment component made by the teachers was found in the teaching plan of literature for the junior high school level in Cimahi, (3) The elements in the component of the assessment made by the teachers were found in the teaching plan of literature for junior high schools in Cimahi?, (4) the way teachers develop the assessment of attitude, knowledge and skills in the literature teaching plan at junior high school in Cimahi. The theory used is the theory of assessment, evaluation, literature, literary teaching, Permendikbud Number 23 of 2016, Permendikbud Number 22 of 2016, and Permendikbud Number 53 of 2015. The results of this study consisted of 20 lesson plans from public and private junior high schools in Cimahi. Among them are five lesson plans from Curriculum 2006 and 15 lesson plans from Curriculum 2013. The lesson plans of literature from Curriculum 2006 had been 80% suitable with the aspects of appraisal in Permendikbud Number 23 of 2016. Meanwhile the lesson plans of literature from Curriculum 2013 had completed 86% aspects with the assessment aspects based on Permendikbud No. 23 of 2016.*

**Keywords:** *assessment, evaluation, literature, and literature teaching*

### **PENDAHULUAN**

Perencanaan pengajaran yang dibuat oleh pendidik sangat penting disusun agar pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara efektif, efisien dan bermutu yang muaranya bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Komponen-komponen dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran pendidik harus lengkap dan sistematis agar memudahkan dalam pelaksanaan mengajarnya. Dimulai dari identitas mata pelajaran, kelas, semester, pokok bahasan, waktu pertemuan, SK (Kurikulum 2006), KI (Kurikulum 2013), KD, Indikator Pencapaian Kompetensi, materi, metode, alat dan sumber, langkah-langkah KBM, dan penilaian. Salah satu komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah komponen penilaian. Komponen ini sangat penting disusun untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Sesuai dengan dengan tujuan dan indikator yang telah ditetapkan.

Sejalan apa yang dijelaskan oleh Koedet (2015) sebagian besar sarjana setuju bahwa guru dapat membuat perbedaan substantif dalam pencapaian akademik siswa.



*Today, most scholars agree that teachers can make a substantive difference in students' academic achievement (Koedet et al., 2015).*

Pendapat lain menjelaskan bahwa meskipun penelitian -- sebagian besar dari Amerika Serikat-- menunjukkan bahwa kualitas guru sangat penting untuk pembelajaran siswa. Mereka juga mengungkapkan bahwa guru sangat bervariasi dalam kemampuan mereka untuk menghasilkan hasil belajar siswa (Bruns dan Luque, 2015), dan sedikit dari varians dalam prestasi siswa dikaitkan dengan karakteristik guru tertentu (Rivkin dkk. 2005).

*While research—mostly from the United States—shows that the quality of teachers is critical for students' learning, they also reveal that teachers vary widely in their ability to produce student learning gains (Bruns and Luque, 2015), and that little of the variance in student achievement is associated with specific teachers characteristics (Rivkin et al., 2005).*

Senada dengan Lara dkk., 2010; Toledo dan Valenzuela (2015) bahwa beberapa penelitian telah berusaha untuk memeriksa kualitas guru dalam konteks perubahan kelembagaan, sebagian besar upaya ini telah difokuskan pada menilai bagaimana indikator kualitas guru berhubungan dengan prestasi siswa.

*While some studies have attempted to examine the quality of teachers within the context of institutional change, most of these efforts have focused on assessing how indicators of teacher quality relate to student achievement (Lara et al., 2010; Toledo and Valenzuela, 2015).*

Dari beberapa pandangan tersebut, jelas bahwa peran pendidik dalam perencanaan dan proses pembelajaran di sekolah sangat penting. Salah satu komponen perencanaan yang sangat penting adalah komponen penilaian karena merupakan alat untuk mengukur ketercapaian tujuan dan indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Namun, masih banyak perencanaan penilaian yang disusun pendidik itu yang belum sesuai dan lengkap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, khususnya pada materi sastra. Maka fokus yang kami teliti adalah kesesuaian dan kelengkapan komponen penilaian pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada materi sastra pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia jenjang SMP di Kota Cimahi.

## **LANDASAN TEORI**

Ansyar (1989) menyatakan bahwa evaluasi mempunyai satu tujuan utama yaitu untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program. Guru adalah orang yang paling penting statusnya dalam kegiatan belajar mengajar karena guru memegang tugas yang amat penting yaitu mengatur dan mengemudikan kegiatan kelas. Untuk membuat proses belajar mengajar lebih efektif maka tugas guru adalah menciptakan kondisi suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran. Untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif tersebut perlu dirancang program pengajaran (hlm. 134).

Purwanto (2011) menyatakan bahwa evaluasi selalu menyangkut pemeriksaan ketercapaian tujuan yang ditetapkan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil dari proses kegiatan dapat mencapai tujuannya. Tujuan dibentuk dari keseluruhan proses kegiatan yang melibatkan komponen-komponen kegiatan. Evaluasi dapat dilakukan atas hasil atau proses. Dalam



evaluasi hasil, pemeriksaan dilakukan atas hasil saja dengan melihat pencapaian tujuan pada hasil kegiatan. Sedangkan dalam evaluasi proses, evaluasi dilakukan atas seluruh komponen dan proses yang terlibat menghasilkan hasil kegiatan (hlm. 5).

Daryanto (2014) menyatakan bahwa ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Keterpaduan,
- b) Keterlibatan siswa,
- c) Koherensi,
- d) Pedagogis, dan
- e) Akuntabilitas (hlm. 19-21).

Arikunto (2003) menyebutkan bahwa tujuan atau fungsi penilaian ada beberapa hal:

- a) Penilaian berfungsi selektif,
- b) Penilaian berfungsi diagnostik,
- c) Penilaian berfungsi sebagai penempatan, dan
- d) Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan (hlm. 10-11).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan bahwa mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik:

- a) Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;
- b) Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas;
- c) Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
- d) Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
- e) Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi; dan
- f) Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi.

Unsur-unsur dalam komponen penilaian yang dibuat oleh pendidik dalam perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Adapun unsur-unsur penilaian itu sebagai berikut.

- a) Jenis Tes,
- b) Bentuk Tes,
- c) Instrumen,
- d) Rubrik Penilaian, dan
- e) Pedoman Penskoran.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 menjelaskan komponen RPP terdiri atas:

- a) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;
- b) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
- c) Kelas/semester;
- d) Materi pokok;





- e) Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam slabus dan KD yang harus dicapai;
- f) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- g) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
- h) Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
- i) Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;
- j) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran;
- k) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
- l) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan
- m) Penilaian hasil pembelajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 tahun 2016 yaitu Bab I Pasal 3 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 tentang Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan jenjang SMP tentang standar penilaian pendidikan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek:

- a) Sikap;
- b) Pengetahuan; dan
- c) Keterampilan.

Rohani (2010) menjelaskan bahwa pengajaran, merupakan totalitas aktivitas belajar-mengajar yang diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi. Dari evaluasi ini diteruskan dengan *follow up* (hlm. 85).

Pentingnya perencanaan pendidikan di Indonesia ditandai dengan adanya desakan masalah dalam berbagai aspek. Tanpa perencanaan maka banyak masalah pendidikan yang akan tertunda penanganannya, dan hal ini dapat menambah besarnya permasalahan pada tahun berikutnya. Melalui perencanaan suasana kritis yang diperlihatkan aspek-aspek pendidikan menjadi berkurang (Harjanto, 2006, hlm. 22).

Wina Sanjaya (2013) menyebutkan bahwa manfaat perencanaan pembelajaran meliputi beberapa hal. *Pertama*, melalui proses perencanaan yang matang. *Kedua*, sebagai alat untuk memecahkan masalah melalui perencanaan yang matang. *Ketiga*, memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Teew (20015) sastra terdiri dari beberapa istilah misalkan dari bahasa barat seperti: *Literature* (Inggris), *literatur* (Jerman), *litteraure* (Prancis), yang semuanya berasal dari bahasa Latin *litteratura* yang kata ini hasil terjemahan dari bahasa Yunani *grammatika: litteratura* dan *grammatika* masing-masing



berdasarkan pada kata *littera* dan *gramma* yang berarti huruf/tulisan, letter (hlm. 19-20).

Pengajaran sastra adalah suatu kegiatan di sekolah berupa kegiatan belajar mengajar yang berhubungan dengan penyampaian materi apresiasi sastra secara langsung maupun tidak langsung (Sayuti, 1983).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *mixed methods* (campuran) kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan eksploratori sekuensial. Pendekatan eksploratori sekuensial adalah suatu strategi dalam pengumpulan data melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap pertama, yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil-hasil tahap pertama. Bobot/prioritas lebih cenderung pada tahap pertama, dan proses pencampuran (*mixing*) antarkedua metode ini terjadi ketika peneliti menghubungkan antara analisis data kualitatif dan pengumpulan data kuantitatif. Strategi eksploratori sekuensial bisa, atau tidak bisa, diimplementasikan berdasarkan perspektif teoretis tertentu (Creswell, 2017: 317).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dengan studi dokumen. Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisa isi. Prinsip dasar dari kajian ini, menurut Guba dan Lincoln (Moleong, 2007, hlm. 220-221) memiliki lima ciri utama, yaitu:

1. Prosesnya harus mengikuti aturan. Aturan itu sendiri haruslah berasal dari kriteria yang ditentukan, dan prosedur yang ditetapkan.
2. Prosesnya sistematis.
3. Prosesnya diarahkan untuk menggenerealisasi.
4. Mempersoalkan isi yang termanifestasikan.
5. Menekankan analisis secara kuantitatif, namun hal tersebut dapat pula dilakukan bersama analisis kualitatif.



**Tabel 1**  
**Parameter Penelitian**  
**Kajian Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur Penilaian Pada RPP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Bidang Sastra Jenjang SMP di Kota Cimahi**

<b>NO.</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TUJUAN PENELITIAN</b>	<b>ASPEK YANG DITELITI</b>	<b>TEKNIK PENELITIAN</b>	<b>SUMBER</b>
1	Komponen RPP (Permendikbud No.22 tahun 2016) <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama Satuan Pendidikan</li><li>2. Mata Pelajaran/ Tema/ Sub tema</li><li>3. Kelas/Semester</li><li>4. Materi Pokok</li><li>5. Alokasi waktu</li><li>6. Tujuan Pembelajaran</li></ol>	RPP sastra yang dirancang guru harus mengandung komponen penilaian	Mendeskripsikan unsur-unsur yang harus ada dalam RPP sastra	Ketersediaan unsur penilaian dalam RPP sastra (Permendikbud No. 22 tahun 2016)	Observasi Studi Dokumentasi	RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi
7.	Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi					
8.	Materi Pembelajaran					
9.	Metode Pembelajaran					
10.	Media Pembelajaran					
11.	Sumber belajar					
12.	Langkah-langkah Pembelajaran					



NO.	PARAMETER	INDIKATOR	TUJUAN PENELITIAN	ASPEK YANG DITELITI	TEKNIK PENELITIAN	SUMBER
13.	Penilaian Hasil Pembelajaran					
2	Aspek penilaian sikap	Komponen penilaian dalam RPP sastra harus mengandung unsur penilaian sikap	Mendeskripsikan unsur penilaian sikap yang harus ada dalam RPP sastra	Ketersediaan penilaian sikap dalam RPP sastra (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 2 tahun 2016)	Observasi Studi Dokumentasi	RPP sastra mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi
3	Format penilaian sikap Berbentuk Format Jurnal	Format penilaian sikap dalam RPP sastra harus unturnya harus lengkap	Mendeskripsikan unsur-unsur yang harus ada dalam penilaian sikap di RPP sastra	Ketersediaan unsur-unsur yang harus ada dalam penilaian sikap pada RPP sastra sesuai dengan aturan. (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)	Observasi Studi Dokumentasi	RPP sastra mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi
4	Teknik penilaian sikap 1. Observasi 2. Penilaian diri 3. Penilaian antarteman	Teknik penilaian sikap yang ditulis pada RPP sastra harus tepat	Mendeskripsikan teknik penilaiansikap yang berbentuk lembar observasi, penilaian diri, penilaian antarteman	Ketersediaan tentang teknik penilaian sikap pada RPP (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016) sastra	Observasi Studi Dokumentasi	RPP sastra mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi



NO.	PARAMETER	INDIKATOR	TUJUAN PENELITIAN	ASPEK YANG DITELITI	TEKNIK PENELITIAN	SUMBER
5	Instrumen penilaian sikap	Instrumen penilaian sikap yang ditulis pada RPP sastra harus lengkap	Mendesripsikan aturan penulisan instrumen penilaian sikap dalam RPP sastra yang berbentuk jurnal	Ketersediaan bentuk-bentuk penilaian dalam setiap jenis tes pada RPP sastra (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)	Observasi  Studi Dokumentasi	RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi
6	Aspek penilaian penilaian pengetahuan	Komponen penilaian dalam RPP sastra harus mengandung penilaian pengetahuan	Mendesripsikan unsur penilaian pengetahuan yang harus ada dalam RPP sastra.	Ketersediaan penilaian pengetahuan dalam RPP sastra (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)	Observasi  Studi Dokumentasi	RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi
7	Jenis pengetahuan 1. Tes tertulis 2. Tes Lisan 3. Penugasa 4. Portofolio	Jenis penilaian pengetahuan dalam RPP sastra harus tepat	Mendesripsikan jenis-jenis penilaian pengetahuan yang harus ada dalam RPP sastra	Ketersediaan jenis-jenis penilaian pengetahuan pada RPP sastra (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)	Observasi  Studi Dokumentasi	RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi
8	Bentuk penilaian	Bentuk	Mendesripsikan	Ketersediaan bentuk-bentuk	Observasi	RPP mata pelajaran Bahasa



NO.	PARAMETER	INDIKATOR	TUJUAN PENELITIAN	ASPEK YANG DITELITI	TEKNIK PENELITIAN	SUMBER
	pengetahuan	penilaian pengetahuan dalam RPP sastra harus tepat	bentuk-bentuk penilaian pengetahuan yang harus ada dalam RPP sastra	bentuk penilaian pengetahuan pada RPP sastra (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)	Studi Dokumentasi	Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi
	a. Jenis Tes Tertulis					
	1. Benar Salah					
	2. Menjodohkan					
	3. Pilihan Ganda					
	4. Isian/melengkapi					
	5. Uraian					
	b. Jenis Tes Lisan					
	1. Tanya jawab					
	c. Penugasan					
	1. Tugas Individu					
	2. Tugas Kelompok					
	d. Portofolio					
	1. Sampel tugas terbaik siswa					
9	Intrumen penilaian pengetahuan	Instrumen penilaian pengetahuan yang ditulis pada RPP sastra harus sesuai dengan Indikator Pencapaian Kompetensi yang	Mendeskrripsikan aturan penyusunan intrumen penilaian pengetahuan RPP	Ketersediaan Isi instrumen penilaian pengetahuan pada RPP sastra yang sesuai aturan. (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)	Observasi Studi Dokumentasi	RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi



NO.	PARAMETER	INDIKATOR	TUJUAN PENELITIAN	ASPEK YANG DITELITI	TEKNIK PENELITIAN	SUMBER
10	Rubrik pengetahuan	penilaian RPP sastra harus mengandung unsur rubrik penilaian pengetahuan	sudah ditetapkan Mendesripsikan aturan ketentuan harus ada rubrik penilaian dalam RPP sastra	Ketersediaan rubrik penilaian pengetahuan sastra dalam unsur RPP yang telah disusun sesuai aturan. (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)	Observasi Studi Dokumentasi	RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi
11	Kesesuaian rubrik penilaian dengan indikator pencapaian kompetensi	Rubrik penilaian pengetahuan yang disusun harus sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi	Mendesripsikan aturan untuk kesesuaian indikator dengan rubrik Penilaian pada RPP sastra	Ketersediaan rubrik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi pada RPP sastra sesuai aturan. (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)	Observasi Studi Dokumentasi	RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi
12	Pedoman penilaian Rumus:	pedoman penskoran dalam penilaian	Mendesripsikan unsur pedoman penskoran yang	Ketersediaan pedoman penskoran dalam unsur penilaian pada	Observasi Studi Dokumentasi	RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi



<b>NO.</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TUJUAN PENELITIAN</b>	<b>ASPEK YANG DITELITI</b>	<b>TEKNIK PENELITIAN</b>	<b>SUMBER</b>
	Nilai yang didapat dibagi nilai ideal dikali 100	pada RPP sastra harus mengandung pedoman penskoran penilaian	harus ada dalam RPP sastra	RPP sastra sesuai aturan. (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)		
13	Aspek penilaian keterampilan	Komponen penilaian dalam RPP sastra harus mengandung penilaian keterampilan	Mendeskripsikan unsur penilaian keterampilan yang harus ada dalam RPP.	Ketersediaan penilaian pengetahuan dalam RPP sastra. (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)	Observasi  Studi Dokumentasi	RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi
14	Aspek jenis penilaian keterampilan 1. Praktik 2. Produk 3. Proyek 4. Portofolio	Jenis penilaian keterampilan dalam RPP sastra sudah tepat	Mendeskripsikan jenis-jenis penilaian pengetahuan yang harus ada dalam penilaian	Ketersediaan jenis-jenis penilaian keterampilan yang tepat pada RPP sastra (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)	Observasi  Studi Dokumentasi	RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi
15	Bentuk penilaian keterampilan	Bentuk penilaian pengetahuan dalam RPP sastra sudah	Mendeskripsikan bentuk-bentuk penilaian keterampilan yang harus ada	Ketersediaan bentuk-bentuk penilaian keterampilan yang tepat pada RPP sastra (Permendikbud No.	Observasi  Studi Dokumentasi	RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi





<b>NO.</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TUJUAN PENELITIAN</b>	<b>ASPEK YANG DITELITI</b>	<b>TEKNIK PENELITIAN</b>	<b>SUMBER</b>
		tepat	dalam penilaian	53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)		
16	Kesesuaian instrumen penelitian keterampilan dengan indikator pencapaian kompetensi	Instrumen penilaian keterampilan yang ditulis pada RPP sastra sudah sesuai sesuai dengan Indikator Pencapaian Kompetensi yang sudah ditetapkan	Mendesripsikan syarat-syarat penyusunan instrumen penilaian keterampilan RPP.	Ketersediaan Isi instrumen penilaian yang sesuai dalam RPP sastra. (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)	Observasi Studi Dokumentasi	RPP pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi
17	Rubrik penilaian keterampilan	Komponen penilaian dalam RPP sastra harus mengandung rubrik penilaian keterampilan	Mendesripsikan aturan ketentuan yang harus ada rubrik penilaian dalam RPP	Ketersediaan rubrik penilaian keterampilan dalam unsur penilaian pada RPP sastra yang telah disusun sesuai aturan. (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)	Observasi Studi Dokumentasi	RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi
18	Kesesuaian rubrik	Rubrik penilaian	Mendesripsikan	Ketersediaan rubrik	Observasi	RPP mata pelajaran Bahasa



<b>NO.</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TUJUAN PENELITIAN</b>	<b>ASPEK YANG DITELITI</b>	<b>TEKNIK PENELITIAN</b>	<b>SUMBER</b>
	penilaian keterampilan dengan indikator pencapaian kompetensi	keterampilan yang disusun sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi	aturan untuk kesesuaian indikator dengan rubrik Penilaian keterampilan	penilaian keterampilan yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)	Studi Dokumentasi	Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi
19	Pedoman penskoran penilaian keterampilan	Penilaian keterampilan pada RPP sastra harus mengandung pedoman penskoran	Mendesripsikan unsur pedoman penskoran yang harus ada dalam RPP	Ketersediaan pedoman penskoran dalam unsur penilaian keterampilan pada RPP sesuai aturan (Permendikbud No. 53 tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016)	Observasi Studi Dokumentasi	RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian sastra jenjang SMP di Kota Cimahi



**Tabel 2**  
**Hasil**

No. RPP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Jumlah	Rekapitulasi (%)		
																					Ya/Sesuai	Tidak Sesuai	
1. 2006	v	X	x	x	x	v	v	v	V	v	v	V	x	x	v	v	x	x	x	v	11	8	56%
2. 2006	v	X	x	x	x	x	x	x	X	v	v	V	v	v	x	v	v	v	v	v	9	10	47%
3. 2006	v	X	x	x	x	v	v	v	V	v	v	V	x	x	v	x	v	v	x	x	10	9	53%
4. 2006	v	V	x	x	x	v	v	v	V	v	v	V	v	v	v	v	v	v	v	v	16	3	84%
5. 2006	v	V	v	v	v	v	v	x	V	v	x	V	v	v	v	v	v	v	v	v	17	2	89%
6. 2013	v	X	x	x	v	v	v	v	V	v	v	V	v	v	v	v	x	x	x	x	13	6	68%
7. 2013	v	V	v	v	v	v	v	v	V	v	v	V	v	v	v	v	v	v	v	v	19		100%
8. 2013	v	V	v	v	v	v	v	v	V	v	v	V	v	v	v	v	v	v	v	v	19		100%
9. 2013	v	V	v	v	v	v	v	v	V	v	v	V	v	v	v	v	v	v	v	v	19		100%
10. 2013	v	V	v	v	v	v	v	v	V	v	v	V	v	v	v	v	v	v	v	v	19		100%
11. 2013	v	V	v	v	v	v	v	v	V	v	v	V	v	v	v	v	v	v	v	v	19		100%



12.	2013	12	v	X	x	x	x	x	x	v	V	v	v	v	v	v	v	v	v	14	5	74%
13.	2013	13	v	X	x	x	x	x	v	v	V	v	v	v	v	v	v	v	v	14	5	74%
14.	2013	14	v	X	x	x	x	x	x	x	V	v	v	v	v	v	v	v	v	12	7	63%
15.	2013	15	v	X	x	x	x	x	v	v	V	v	v	v	v	v	v	v	v	14	5	74%
16.	2013	16	v	V	v	v	v	v	v	v	V	x	x	v	v	x	x	x	v	14	5	74%
17.	2013	17	v	V	v	v	v	v	v	v	V	v	v	v	v	v	v	v	v	19		100%
18.	2013	18	v	V	v	v	v	v	v	v	V	v	v	v	v	v	v	v	v	19		100%
19.	2013	19	V	V	v	v	v	v	v	v	V	v	v	v	v	v	v	v	v	19		100%
20.	2013	20	V	X	x	x	v	v	v	v	V	v	v	v	X	x	x	x	12	7	63%	

Total dari hasil rekapitulasi tersebut untuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang menggunakan kurikulum 2006 yaitu 329:5=80% sedangkan RPP yang menggunakan kurikulum 2013 yaitu 1290:15 = 86%

**Keterangan:**

v = Ya/Sesuai

x = Tidak Sesuai



**Tabel 3**  
**Pembahasan**

No.	RPP				Kelas	Pembahasan	
	2006	2013	2015				
	Puisi	Prosa	Drama	Puisi	Prosa	Drama	
1.	v				v		Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015. Kekurangan RPP ini adalah pada ketidakadaan bentuk penilaian pengetahuan, padahal seharusnya ada sebagai pengantar peserta didik dalam mendapatkan penilaian keterampilan, misalnya menentukan sistematika dan diksi sebelum menulis puisi secara teoretis sehingga rubrik penilaian pengetahuan pun tidak ada. Untuk penilaian keterampilan dalam RPP ini sudah ada sesuai dengan KD, tujuan dan indikator yang telah ditetapkan tetapi tidak ada rubrik penilaiannya. Seharusnya untuk menilai keterampilan dibuat rubrik penilaian dan pedoman penskorannya agar penilaian itu jelas parameternya sehingga nilai yang dihasilkan benar-benar objektif.
2.	v				v		Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang disusun oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tersebut tidak ditemukan unsur penilaian sikap. Seharusnya di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra mengandung unsur penilaian sikap yang ditulis pada bagian khusus dengan ditulis kata karakter, macam-macam karakter yang ditentukan untuk satu kompetensi dasar. Biasanya diletakkan

tersendiri setelah kompetensi dasar atau tujuan atau diletakkan di akhir kalimat dalam setiap tujuan sebagai *degree*. Pada komponen penilaian harus dibuat rubrik penilaian sikap sesuai dengan karakter yang sudah ditentukan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra sehingga menjadi panduan pendidik dalam menilai sikap peserta didik secara objektif.

3. v v
- Kajian terhadap RPP sastra ini mengandung komponen penilaian, tetapi tidak memiliki unsur penilaian sikap. Seharusnya di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra mengandung unsur penilaian sikap yang ditulis pada bagian khusus dengan ditulis kata karakter macam-macam karakter yang ditentukan untuk satu kompetensi dasar. Biasanya diletakkan tersendiri setelah kompetensi dasar atau tujuan atau diletakkan di akhir kalimat dalam setiap tujuan sebagai *degree*. Dan, pada komponen penilaian harus dibuat rubrik penilaian sikap sesuai dengan karakter yang sudah ditentukan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra. RPP ini memiliki unsur penilaian pengetahuan dengan bentuk, jenis tes, instrumen, rubrik dan pedoman penskorannya sudah tepat. Namun untuk penilaian keterampilan tidak ada karena di dalam tujuannya tidak mengandung unsur keterampilan.

4. v v
- Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang disusun oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tetapi teknik, format dan aspek penilaian sikap tidak ada. Seharusnya ada pada komponen penilaian harus dibuat rubrik penilaian sikap sesuai dengan karakter yang sudah ditentukan dalam Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra inимemiliki komponen penilaian aspek penilaian pengetahuan. Jenis penilaian pengetahuan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra sudah tepat dan memiliki bentuk penilaian pengetahuan yang tepat. Instrumen penilaian pengetahuan yang ditulis pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan dan memiliki unsur rubrik penilaian pengetahuan yang disusun sesuai dengan indikator capaian kompetensi. Selanjutnya, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra memiliki pedoman penskoran penilaian pengetahuan yang tepat. Komponen penilaian yang disusun oleh pendidik dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra juga memiliki komponen penilaian keterampilan serta memiliki jenis penilaian keterampilan yang tepat dilengkapi dengan rubrik dan pedoman penskoran yang tepat.

5. v

v Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang disusun oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tersebut tidak ditemukan komponen penilaian yang memiliki unsur penilaian sikap padahal pada RPP-nya sudah ada unsur karakter. Selain itu, aspek penilaian sikap pada format dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tidak memiliki unsur yang lengkap. Bentuk dan jenis tes tidak dituliskan, instrumen pengetahuan tidak tetapi instrumen keterampilan ada disertai rubriknya. Seharusnya penilaian pengetahuan dan rubrik

	penilaiannya ada sesuai dengan tujuan dan indikator yang telah ditentukan.
<b>6.</b>	<b>V</b> Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh pendidik ini, memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dan permendikbud No. 23 tahun 2016 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini memiliki unsur penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan tetapi untuk rubrik penilaian pengetahuan dan keterampilan tidak ada. Seharusnya ada sebagai panduan dalam memberikan penilaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang dijadikan sebagai parameter penilaian dan pedoman penilaian sehingga nilai yang dihasilkan benar-benar objektif. Tetapi dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini sudah memiliki pedoman penskoran.
<b>7.</b>	<b>V</b> Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang disusun oleh pendidik ini, memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dan permendikbud No. 23 tahun 2016. Namun, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini tidak ditemukan unsur penilaian sikap. Seharusnya di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini mengandung unsur penilaian sikap yang berbentuk format jurnal dengan teknik observasi, penilaian diri dan penilaian antarteman.
<b>8.</b>	<b>V</b> Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang disusun oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan





- 
- Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tersebut ditemukan unsur penilaian sikap sudah lengkap dengan bentuk penilaian sikap dan format jurnalnya untuk mengukur KI 1 dan KI 2.
- 
- 9.** **V** Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang disusun oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tersebut ditemukan unsur penilaian sikap sudah lengkap dengan bentuk penilaian sikap dan format jurnalnya untuk mengukur KI 1 dan KI 2.
- 
- 10.** **V** Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tersebut ditemukan unsur penilaian sikap sudah lengkap dengan bentuk penilaian sikap dan format jurnalnya untuk mengukur KI 1 dan KI 2.
- 
- 11.** **V** Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang disusun oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tersebut tidak ditemukan unsur penilaian sikap. Seharusnya di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini mengandung unsur penilaian sikap
-

yang berbentuk format jurnal dengan teknik observasi (penilaian diri dan penilaian antarteman dilakukan minimal satu semester satu kali).

- |            |          |          |  |
|------------|----------|----------|--|
| <b>12.</b> | <b>V</b> | <b>V</b> | <p>Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang disusun oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tersebut tidak ditemukan unsur penilaian sikap. Seharusnya di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini mengandung unsur penilaian sikap yang berbentuk format jurnal dengan teknik observasi (penilaian diri dan penilaian antarteman dilakukan minimal satu semester satu kali). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini memiliki komponen penilaian aspek penilaian pengetahuan. Jenis tes, bentuk tes, instrumen, rubrik penilaian dan pedoman penskoran penilaian pengetahuan sudah lengkap dan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.</p> |
| <b>13.</b> | <b>V</b> | <b>V</b> | <p>Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang disusun oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tersebut tidak ditemukan unsur penilaian sikap. Seharusnya di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini mengandung unsur penilaian sikap yang berbentuk format jurnal dengan teknik observasi (penilaian</p>  |

diri dan penilaian antarteman dilakukan minimal satu semester satu kali).

**14.** v v v Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tersebut tidak ditemukan unsur penilaian sikap. Seharusnya di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini mengandung unsur penilaian sikap yang berbentuk format jurnal dengan teknik observasi (penilaian diri dan penilaian antarteman dilakukan minimal satu semester satu kali).

**15.** V v Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang disusun oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tersebut tidak ditemukan unsur penilaian sikap. Seharusnya di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini mengandung unsur penilaian sikap yang berbentuk format jurnal dengan teknik observasi (penilaian diri dan penilaian antarteman dilakukan minimal satu semester satu kali).

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini memiliki komponen penilaian aspek penilaian pengetahuan. Jenis tes, bentuk tes, instrumen, rubrik penilaian dan pedoman penskoran penilaian pengetahuan sudah lengkap dan sesuai dengan indikator

pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

Ditemukan juga pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini tidak memiliki komponen penilaian aspek penilaian keterampilan. Seharusnya ada penilaian keterampilan menulis karena pada Kompetensi Dasarnya peserta didik harus mampu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen. Ini masuk di ranah keterampilan dan dibutuhkan rubrik penilaian sebagai parameter dalam menilai kreatif siswa.

**16.**

**V**

**V**

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang disusun oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tersebut ditemukan unsur penilaian sikap sudah lengkap dengan bentuk penilaian sikap dan format jurnalnya untuk mengukur KI 1 dan KI 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini juga memiliki penilaian pengetahuan dengan jenis tes, bentuk, tes, instrumen, rubrik penilaian dan pedoman penskoran sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dan tujuan pembelajaran.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini memiliki unsur penilaian keterampilan dengan jenis tes, bentuk, tes, instrumen, rubrik penilaian dan pedoman penskoran keterampilan sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi keterampilan dan tujuan pembelajaran.

**17.**

**V**

**V**

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang disusun

oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tersebut ditemukan unsur penilaian sikap sudah lengkap dengan bentuk penilaian sikap dan format jurnalnya untuk mengukur KI 1 dan KI 2. Juga memiliki penilaian pengetahuan dengan jenis tes, bentuk, tes, instrumen, rubrik penilaian dan pedoman penskoran sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dan tujuan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini memiliki unsur penilaian keterampilan dengan jenis tes, bentuk, tes, instrumen, rubrik penilaian dan pedoman penskoran sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dan tujuan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini memiliki unsur penilaian keterampilan dengan jenis tes, bentuk, tes, instrumen, rubrik penilaian dan pedoman penskoran sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dan tujuan pembelajaran.

18.

V

V

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang disusun oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tersebut ditemukan unsur penilaian sikap sudah lengkap dengan bentuk penilaian sikap dan format jurnalnya untuk mengukur KI 1 dan KI 2. Juga memiliki penilaian pengetahuan dengan jenis tes, bentuk, tes, instrumen, rubrik penilaian dan pedoman penskoran sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dan tujuan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini memiliki unsur penilaian keterampilan dengan jenis tes, bentuk, tes, instrumen, rubrik penilaian dan pedoman penskoran sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dan tujuan pembelajaran.

keterampilan sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi keterampilan dan tujuan pembelajaran.

<b>19.</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<p>Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang disusun oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tersebut ditemukan unsur penilaian sikap sudah lengkap dengan bentuk penilaian sikap dan format jurnalnya untuk mengukur KI 1 dan KI 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini juga memiliki penilaian pengetahuan dengan jenis tes, bentuk, tes, instrumen, rubrik penilaian dan pedoman penskoran sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dan tujuan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini memiliki unsur penilaian keterampilan dengan jenis tes, bentuk, tes, instrumen, rubrik penilaian dan pedoman penskoran keterampilan sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi keterampilan dan tujuan pembelajaran.</p>
<b>20.</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<p>Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra yang disusun oleh pendidik memiliki komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis kami pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra tersebut ditemukan unsur penilaian sikap sudah lengkap dengan bentuk penilaian sikap dan format jurnalnya untuk mengukur KI 1 dan KI 2. Juga memiliki penilaian pengetahuan dengan jenis tes, bentuk, tes, instrumen, rubrik penilaian dan pedoman penskoran sudah sesuai dengan</p>



indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dan tujuan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sastra ini memiliki unsur penilaian keterampilan dengan jenis tes, bentuk, tes, instrumen, rubrik penilaian dan pedoman penskoran keterampilan sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi keterampilan dan tujuan pembelajaran.

---



**Tabel 4  
Temuan**

Berikut rincian temuan hasil observasi terhadap unsur-unsur yang ada dalam komponen penilaian dalam RPP sastra pendidik mata pelajaran Bahasa Indonesia jenjang SMP di Kota Cimahi

No.	Asal Sekolah	Kelas	Materi	Kurikulum		Unsur Penilaian RPP						Presentase Kelengkapan		
				2006	2013	Jenis	Bentuk		Instrumen		Rubrik		Pedoman Penskoran	
							Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Tujuan	Tidak Sesuai Tujuan	Tepat			Tidak Tepat
1.	SMP Swasta	VII	CERPEN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	80%
2.	SMP Negeri	IX	CERPEN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100%
3.	SMP Negeri	VII	NOVEL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100%
4.	SMP. Swasta	VIII	NOVEL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100%
5.	SMP Swasta	VII	PUISI	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100%
6.	SMP Negeri	IX	CERPEN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100%
7.	SMP Negeri	VIII	DRAMA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	80%





8.	SMP Negeri	VIII	DRAMA	+	+	+	+	+	+	80%
9.	SMP Negeri	VIII	DRAMA	+	+	+	+	+	+	100%
10.	SMP Swasta	VIII	DRAMA	+	+	+	+	+	+	80%
11.	SMP Swasta	VIII	DRAMA	+	+	+	+	+	+	100%
12.	SMP Swasta	VII	FABEL/ LEGEND A	+	+	+	+	+	+	100%
13.	SMP Negeri	VII	FABEL/ LEGEND A	+	+	+	+	+	+	100%
14.	SMP Swasta	VII	NOVEL	+	+	+	+	+	+	100%
15.	SMP Swasta	VII	PUISI	+	+	+	+	+	+	100%
16.	SMP Negeri	VII	PUISI	+	+	+	+	+	+	100%
17.	SMP Negeri	VIII	PUISI	+	+	+	+	+	+	100%
18.	SMP Negeri	VIII	PUISI	+	+	+	+	+	+	100%





## **PENUTUP**

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang diobservasi dalam penelitian ini berjumlah 20 dari 36 SMP negeri dan swasta di Kota Cimahi, yang terdiri atas lima Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2006 dan 15 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 jumlah yang diobservasinya lebih banyak daripada Kurikulum 2006 dengan alasan sekolah di Kota Cimahi lebih banyak yang sudah menggunakan Kurikulum 2013. Semua Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang diobservasi baik Kurikulum 2006 maupun Kurikulum 2013 memiliki komponen penilaian.

Bentuk komponen penilaian pada lima Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2006 yang diobservasi sebagai berikut: (a) jenis tes, (b) bentuk tes, (c) instrumen, (d) rubrik penilaian, dan (e) pedoman penskoran. Satu di antara lima Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang diobservasi tidak lengkap. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tersebut tidak memiliki pedoman penskoran, sedangkan empat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang lain memiliki komponen penilaian lengkap. Berdasarkan hasil observasi dari lima Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 80% RPP sastra yang sesuai dengan aspek penilaian Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.

Kurikulum 2013 aspek penilaian pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sudah dipilah secara jelas. Ini terdapat dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Bab II Lingkup Penilaian Pasal 3 ayat (1) yang berisi Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek: (a) sikap, (b) pengetahuan, dan (c) keterampilan. Hasil observasi dari 15 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 mengenai komponen penilaian sebagai berikut: 10 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, dan dua Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang tidak lengkap secara umum; satu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang tidak memiliki aspek penilaian keterampilan, satu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang tidak memiliki aspek penilaian sikap, dan satu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang tidak memiliki aspek penilaian sikap dan keterampilan. Berdasarkan hasil observasi dari 15 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 86% yang memiliki kelengkapan unsur dengan aspek penilaian sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansyar, M. (1989). *Dasar-dasar pengembangan kurikulum*. Jakarta: Depdikbud.
- Arikunto, S. (2003). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design*, (diterjemahkan oleh Achmad, F. dari *Research design*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daryanto. (2014). *Evaluasi pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faikhamta, C. C A. (2018). *Thai cooperating teachers' motivations and challenges in supervising student teachers during their internship program*. *Kasetsart journal of social sciences*, xxx(2), 1-7.
- Harjanto. (2006). *Perencanaan pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Koedet. (2018). *Teacher quality and student achievement in Chile: Linking teachers' contribution and observable characteristics. International journal of educational development*, 60(1), 33-50.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar.
- Purwanto. (2011). *Evaluasi hasil belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohani, A. (2010). *Pengelolaan pengajaran: Sebuah pengantar menuju guru profesional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sanjaya, W. (2013). *Perencanaan dan desain sistem pembelajaran*. Jakarta: Kencana
- Suminto, S.A. (1983). *Pengantar pengajaran puisi*. Yogyakarta: FKS IKIP Muhamadiyah.
- Teew.A. (2015). *Sastra dan ilmu sastra*. Bandung: Pustaka Jaya.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 2 Kelompok 5**

Pembicara : Saidiman, Rina Heryani, dan Erlinda Nofasari  
Judul Makalah : “Analisis Komponen Penilaian dalam Perencanaan Pengajaran Sastra Jenjang SMP di Kota Cimahi”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.00  
Moderator : Dr. Asrif, M.Hum.  
Pencatat : 1. Miranti Sudarmaji  
2. Mukhamdanah

**Rangkuman Penyajian Makalah**

Tentang standar penilaian pendidikan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

1. Unsur-unsur komponen penilaian pada 5 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2006, 1 merupakan RPP yang tidak lengkap karena tidak memiliki pedoman penskoran.
2. Unsur-unsur komponen penilaian pada 15 RPP Kurikulum 2013, sebanyak 12 RPP sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, dan 2 RPP tidak lengkap; 1 merupakan RPP yang tidak memiliki aspek penilaian keterampilan dan 1 RPP tidak memiliki aspek penilaian sikap.
3. Untuk penilaian sikap pada Kurikulum 2006, guru agar dapat membuat rubrik penilaian sehingga penilaian yang diberikan kepada siswa objektif dan terarah.
4. Untuk penilaian sikap pada Kurikulum 2013, penilaian guru harus memberikan penulisan di RPP untuk penilaian ada dua format jurnal, yaitu: (1) Penilaian Sikap Spritual (KI 1), (2) Penilaian Sikap Sosial (KI 2).
5. Pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada bapak/ibu guru tentang konsep dan praktik membuat penilalain dalam RPP.

**Tanya Jawab**

**Penanya**

Nama : Sulastri  
Instansi : SMA Indramayu

**Pertanyaan:**

Mengapa yang dijadikan penelitian hanya RPP yang berkaitan dengan Kurikulum 2006 dan tidak ke Kurikulum 2013?

**Jawaban:**

Objek penelitian adalah RPP 2006 dan 2013. Hal ini disebabkan di sekolah sekolah yang masih menggunakan dua kurikulum tersebut.



### Isu-Isu Penting:

1. Analisis penilaian RPP Sastra Kurikulum 2006. Komponen penilaian sesuai Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015, tetapi **tidak ditemukan** unsur penilaian sikap. Terdapat komponen pengetahuan, rubrik penilaian pengetahuan, dan pedoman penskoran yang tepat. Namun, tidak memiliki komponen penilaian keterampilan, rubrik penilaian, pedoman penskoran keterampilan juga tidak ada.
2. Ditemukan empat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada Kurikulum 2006 memiliki unsur-unsur dalam komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Sementara itu, satu RPP Kurikulum 2006 **tidak memenuhi** salah satu unsur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yaitu tidak memiliki unsur penilaian pedoman penskoran. Lima RPP sesuai dengan aspek penilaian Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.
3. Dua belas RPP pada Kurikulum 2013 memiliki unsur-unsur dalam komponen penilaian yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Sementara itu, dua RPP pada Kurikulum 2013 **tidak memenuhi** salah satu unsur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yaitu tidak memiliki unsur pedoman penilaian. Satu RPP pada Kurikulum 2013 **tidak memenuhi** salah satu unsur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yaitu tidak memiliki unsur rubrik penilaian. Dari 15 RPP, hanya 12 yang sesuai dengan aspek penilaian Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.



## 8. Variasi Bahasa Indonesia Penutur Jati Bahasa Maanyan dalam Internalisasi Bahasa Indonesia

### VARIASI BAHASA INDONESIA PENUTUR JATI BAHASA MAANYAN DALAM INTERNALISASI BAHASA INDONESIA

*Indonesian Language Variation by Maanyan Native Speaker  
in Indonesian Language Internalization*

**Kity Karenisa**

Program Ilmu Linguistik

Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

kitykarenisa@gmail.com

#### **Abstrak**

Orang Indonesia pada umumnya adalah dwibahasawan atau bahkan multibahasawan. Masyarakat multibahasawan menghadapi kenyataan bahwa bahasa yang dikuasanya saling memengaruhi walaupun bahasa-bahasa tersebut mempunyai fungsi dan ranah pemakaian yang berbeda. Hal inilah yang menimbulkan variasi bahasa, termasuk variasi bahasa Indonesia yang dituturkan oleh masyarakat tutur bahasa Indonesia yang juga masyarakat tutur bahasa Maanyan dan bahasa Banjar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran variasi bahasa Indonesia penutur jati bahasa Maanyan dari karakteristik-karakteristik linguistik yang tecermin dalam variasi fonologis, variasi morfologis, dan variasi sintaksisnya. Data dikumpulkan dari subjek penelitian pada tahun 2016 dan 2017 di wilayah pertuturan, kemudian dikelompokkan berdasarkan fonologi, morfologi, dan sintaksis, lalu membandingkannya dengan karakteristik bahasa Indonesia standar. Dengan demikian, diperoleh deskripsi variasi bahasa Indonesia penutur jati bahasa Maanyan. Dengan mengamati variasi tersebut juga mengaitkannya dengan hasil pengamatan terhadap masyarakat tutur di daerah pertuturan bahasa Maanyan diperoleh gambaran tentang penyebab terjadinya variasi bahasa Indonesia tersebut. Internalisasi bahasa Indonesia tidak dapat mengabaikan variasi bahasa Indonesia tersebut.

**Kata-kata kunci:** variasi bahasa, Indonesia, Maanyan, internalisasi

#### **Abstract**

*Generally, an Indonesian is a bilingual. In many cases they are a multilingual. As a multilingual, Indonesian have to realize that his/her languages affect each other even though the languages have their own function and speech domain. These situations cause a language variation, included Indonesian language variation by Maanyan native speaker who are Indonesian language speaker, Maanyan language speaker, and Banjar language speaker in Central and South Borneo, Republic of Indonesia. Findings of this research give a clear description about Indonesian language variation by Maanyan native speaker by its linguistic features on phonological variation, morphological variation, and syntactical variation. Data research had been collected in 2016 and 2017 at speech area and then been analyzed by its linguistics feature. The linguistics features in Indonesian*



*languages by Maanyan native speaker were compared to standard Indonesian language so that we get the description on Indonesian language variation by Maanyan native speaker. By relate the research findings to speech community observation, we get the description on Indonesian language variation causes. This variation is unignorable in internalization of Indonesian language.*

**Keywords:** *language variation, Indonesian, Maanyan, internalization*

## **PENDAHULUAN**

Orang (Dayak) Maanyan yang mendiami wilayah Indonesia di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan adalah masyarakat tutur yang hidup sebagai multibahasawan. Paling sedikit, orang Maanyan menguasai tiga bahasa, yaitu bahasa Maanyan sebagai bahasa ibu atau bahasa jati, bahasa Banjar sebagai *lingua franca*, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Bahasa Maanyan, bahasa jati orang Maanyan, adalah bahasa yang paling dominan digunakan di antara delapan bahasa daerah yang dituturkan oleh penduduk asli Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahasa Maanyan digunakan sebagai bahasa pergaulan di lingkungan keluarga juga masyarakat, bahasa perhubungan, dan bahasa pengantar di tingkat awal sekolah dasar. Di kabupaten yang luasnya masing-masing 8.830 km<sup>2</sup> untuk Kabupaten Barito Selatan dan 3.834 km<sup>2</sup> untuk Kabupaten Barito Timur, bahasa Maanyan digunakan di seluruh wilayah kabupaten. Sebenarnya penggunaan bahasa Maanyan tidak hanya terbatas di dua kabupaten tersebut, tetapi bersama dengan menyebarnya orang Maanyan bahasa itu pun menebar sampai ke Kabupaten Barito Utara di sebelah utara, anak Sungai Karau di sebelah barat, dan Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan di sebelah timur (Kawi, 1984; Ngabut, dkk., 1985; Iper, dkk. 1998 dan 2000). Pada tahun 2003, Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah melalui Registrasi Penduduk Kalimantan Tengah Pertengahan Tahun 2003 mencatat bahwa penutur bahasa Maanyan berjumlah 145.500, sedangkan Summer Institute of Linguistics (SIL) melalui <https://www.ethnologue.com/language/mhy> menyebutkan bahwa penutur bahasa Maanyan berjumlah 150.000 orang. Namun, perkembangan jumlah penutur sejak tahun 2003 hingga 2017 tidak ditemukan dalam publikasi mana pun.

Bahasa Banjar, sebagai *lingua franca*, adalah bahasa yang dituturkan oleh penduduk Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dengan total penutur 3.505.000 yang menyebar di wilayah Republik Indonesia. SIL mengategorikan bahasa Banjar ini sebagai LWC (*language of wider communication*) karena keluasannya dalam perdagangan (<https://www.ethnologue.com/language/bjn>). Orang Banjar yang berbahasa jati bahasa Banjar pada umumnya merupakan pedagang sehingga bahasa Banjar menjadi bahasa perdagangan yang digunakan di pasar dan sektor bisnis. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan transaksi dagang, orang Maanyan harus mampu menggunakan bahasa Banjar.

Bahasa Indonesia yang ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada tahun 1928, kemudian dikukuhkan sebagai bahasa resmi negara pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lalu diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan bahasa wajib dikuasai oleh seluruh rakyat





Indonesia, termasuk orang Maanyan. Orang Maanyan menggunakan bahasa Indonesia di dalam dunia pendidikan, dalam komunikasi dengan pendatang dari luar Pulau Kalimantan, dalam dapat memahami siaran radio dan televisi, serta dalam ibadah di masjid atau gereja.

Sebagai penutur bahasa yang multilingual karena penguasaan paling sedikit atas tiga bahasa tersebut, orang Maanyan tidak lepas dari apa yang dialami masyarakat yang multilingual. Thomason (2001) mengatakan bahwa tidak ada satu pun bangsa yang monolingual. Namun, ketika seorang penutur bahasa Maanyan menuturkan bahasa Indonesia yang bukan merupakan bahasa jatinya, bentuk-bentuk kebahasaan yang digunakan memiliki ciri tertentu. Ciri ini yang akhirnya dapat menunjukkan bahwa si penutur bahasa Indonesia itu adalah penutur jati bahasa Maanyan.

Bentuk-bentuk kebahasaan yang digunakan ketika penutur bahasa Maanyan menuturkan bahasa Indonesia tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang kebahasaan. Pencampuran sistem bahasa jati dan bahasa yang dikuasai setelahnya selalu terjadi ketika seseorang dalam proses menguasai bahasa lainnya. Kekhasan seperti itu umumnya dikaitkan dengan interferensi yang terjadi karena kontak bahasa pada masyarakat multikultural yang multilingual. Penggunaan bahasa Indonesia dengan karakteristik khusus tersebut memunculkan variasi bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia yang dituturkan oleh penutur jati bahasa Maanyan. Variasi itu tampak pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis.

Permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah variasi bahasa Indonesia penutur jati bahasa Maanyan yang terlihat dalam (1) karakteristik fonologi bahasa Indonesia penutur jati bahasa Maanyan, (2) karakteristik morfologi bahasa Indonesia penutur jati bahasa Maanyan, (3) karakteristik sintaksis bahasa Indonesia penutur jati bahasa Maanyan, dan (4) faktor penyebab variasi bahasa Indonesia penutur jati bahasa Maanyan.

## LANDASAN TEORETIS

Istilah multilingual digunakan untuk merujuk pada keadaan penutur yang menguasai lebih dari satu bahasa (Wardhaugh dan Fuller, 2015). Dalam masyarakat multilingual itu, penutur tidak memiliki kemampuan yang sama persis untuk setiap bahasa tersebut. Masyarakat yang multilingual ada karena adanya kontak bahasa. Thomason (2001) mendefinisikan kontak bahasa sebagai penggunaan lebih dari satu bahasa pada saat dan tempat yang sama. Dalam kontak bahasa tersebut lumrah terjadi hal seperti interferensi atau transfer bahasa atau *constraints on contact-induced language change*. Gejala itu terlihat pada semua unsur bahasa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik leksikal.

Winford (2013) membedakan antara interferensi dan pinjaman. Interferensi menurutnya biasanya diasosiasikan dengan situasi pemerolehan bahasa kedua dan pergeseran bahasa (*language shift*) dan dideskripsikan sebagai bahasa pertama atau bahasa utama lain pada bahasa kedua. Pinjaman (Winford mengutip Thomason dan Kaufman, 1988) dipandang sebagai “*the incorporation of foreign feature into a group’s native language by the speaker of that language*”. Namun, baik pinjaman maupun interferensi dipandang sebagai penggunaan unsur bahasa pertama secara tidak sadar pada bahasa kedua seseorang. Dalam hal ini, Winford memandang interferensi sebagai bagian dari pinjaman.



Pada masyarakat multilingual, interferensi itu terjadi karena pengaruh bahasa yang dominan. Semakin intensif kontak antarbahasa itu, semakin banyak kemungkinan interferensi yang terjadi. Jika itu melibatkan masyarakat tutur bahasa yang luas, masyarakat tutur dengan jumlah yang sedikit akan dipengaruhi masyarakat tutur yang jumlahnya banyak. Begitu juga dengan dominasi sosio-ekonomis (Thomason, 2001).

## **METODE PENELITIAN**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati perilaku berbahasa subjek penelitian. Hal ini dilakukan dengan anggapan bahwa perilaku berbahasa hanya dapat benar-benar dipahami jika diamati dalam situasi yang sebenarnya dengan konteks yang lengkap (Gunarwan, 2002). Dalam perilaku atau kegiatan berbahasanya, subjek penelitian menuturkan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah kata dan kalimat berupa kata polimorfemis, frasa, klausa, dan kalimat bahasa Indonesia yang dituturkan oleh penutur jati bahasa Maanyan. Penutur jati yang menjadi subjek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penutur berbahasa jati bahasa Maanyan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan mengacu pada Ayatrohaedi (2002), syarat-syarat tersebut, antara lain, (a) berusia 40--50 tahun, (b) berpendidikan tidak terlalu tinggi, (c) berasal dari pedesaan dan tidak pernah meninggalkan desanya cukup lama, dan (d) berorang tua pribumi setempat.

Data tersebut diambil pada bulan Januari, Juli, Agustus, dan Desember pada tahun 2016 dan 2017 di wilayah pertuturan bahasa Maanyan di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah yang dianggap daerah asal bahasa Maanyan dan tempat dituturkannya dialek standar bahasa Maanyan.

Data yang terkumpul dikelompokkan dan dianalisis berdasarkan tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis, yaitu tataran yang menurut Verhaar (1996) termasuk struktur bahasa. Setelah itu, dilakukan perbandingan dengan karakteristik tataran pada bahasa Indonesia standar. Dengan demikian, terlihat variasi bahasa Indonesia yang dituturkan oleh penutur jati bahasa Maanyan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Variasi Fonologis**

Kekhasan bahasa Indonesia penutur jati bahasa Maanyan pada tataran fonologis ini dapat digolongkan dalam tiga golongan karakteristik, yaitu karakteristik nasal dengan bunyi bersuara, karakteristik [u], dan karakteristik [ɛ].

### **Karakteristik Nasal dengan Bunyi Bersuara**

Secara umum, pada tataran fonologi, penutur jati bahasa Maanyan mempunyai karakteristik nasal dalam setiap vokal dan konsonan. Secara khusus, karakteristik tersebut terdapat pada ciri bunyi [ŋ], [n], [ñ], dan [m]. Ciri tersebut terlihat pada contoh berikut.

<b>Bahasa Indonesia</b>	<b>Bahasa Indonesia Penutur Jati Maanyan</b>
panggung [paŋ.gan]	[pa.ŋ <sup>g</sup> an]
kandang [kan.dan]	[ka.n <sup>d</sup> an]



janji [jan.ji]	[ja. <sup>n̩</sup> ji]
sumbang [sum.baŋ]	[su.m <sup>b</sup> aŋ]

Kata seperti *sumbang* dalam bahasa Indonesia memiliki bunyi [m] dan [b] yang berdampingan diucapkan oleh penutur jati bahasa Maanyan sebagai [mb] dalam satu silabel dengan pelepasan bunyi [b] dalam pengucapan bunyi nasal tersebut. Kata seperti *kandang* dalam bahasa Indonesia yang memiliki bunyi [n] dan [d] yang berdampingan diucapkan oleh penutur jati bahasa Maanyan sebagai [nd] dalam satu silabel dengan pelepasan bunyi [d] dalam pengucapan bunyi nasal tersebut. Kata seperti *janji* dalam bahasa Indonesia yang memiliki bunyi [n] dan [j] yang berdampingan diucapkan oleh penutur jati bahasa Maanyan sebagai [n̩<sup>j</sup>] dalam satu silabel dengan pelepasan bunyi [j] dalam pengucapan bunyi nasal tersebut. Kata seperti *panggang* dalam bahasa Indonesia yang memiliki bunyi [ŋ] dan [g] yang berdampingan diucapkan oleh penutur jati bahasa Maanyan sebagai [ŋ<sup>g</sup>] dalam satu silabel dengan pelepasan bunyi [g] dalam pengucapan nasal tersebut.

Proses menghasilkan konsonan-konsonan nasal ini dipengaruhi konsonan hambat berdasarkan tempat artikulasi dengan bergetarnya pita suara. Dengan demikian, ketika yang dihasilkan tersebut adalah konsonan nasal bilabial [m], konsonan yang dihasilkan akan dipengaruhi konsonan hambat bilabial bersuara [b]. Ketika yang dihasilkan tersebut adalah konsonan nasal apiko-alveolar [n], konsonan yang dihasilkan akan dipengaruhi konsonan hambat apiko-alveolar bersuara [d]. Ketika yang dihasilkan tersebut adalah konsonan nasal medio-lamial [n̩], konsonan yang dihasilkan akan dipengaruhi konsonan hambat medio-lamial bersuara [j]. Ketika yang dihasilkan tersebut adalah konsonan nasal dorso-velar [ŋ], konsonan yang dihasilkan akan dipengaruhi konsonan hambat dorso-velar bersuara [g].

### Karakteristik [u]

Karakteristik ini termasuk karakteristik yang menonjol pada tataran fonologi. Karakteristik ini termasuk karakteristik yang tetap ada walaupun penutur jati bahasa Maanyan tersebut telah menjadi seorang multilingual.

Bahasa Maanyan tidak mempunyai fonem vokal /o/ sebagaimana yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ketika penutur jati bahasa Maanyan tersebut berbahasa Indonesia, fonem ini digantikan oleh alomorf fonem /u/, yaitu bunyi [u]. Perhatikan contoh berikut.

Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia Penutur Jati Maanyan
botol [botol]	[butul]
kompres [kompres]	[kumpres]
sepeda motor [səpeda motor]	[sepɛda mutUr]
bengkok [beŋkok]	[beŋkuk]

### Karakteristik [ɛ]

Bahasa Maanyan tidak mempunyai fonem vokal /ə/ yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ketika penutur jati bahasa Maanyan tersebut



berbahasa Indonesia, fonem ini digantikan oleh alomorf fonem /e/, yaitu bunyi [ɛ]. Perhatikan contoh berikut.

Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia Penutur Jati Maanyan
enam [ənam]	[ɛnam]
engkau [əŋkaw]	[ɛŋkaw]
emas [əmas]	[ɛmas]
enyah [əñah]	[ɛñah]
cerdas [cərdas]	[ɛrdas]

### Variasi Morfologis

Kekhasan bahasa Indonesia penutur jati bahasa Maanyan pada tataran morfologi ini dapat digolongkan dalam empat golongan karakteristik, yaitu karakteristik afiks, karakteristik klitik, karakteristik pemarkah persona, dan karakteristik reduplikasi.

### Karakteristik Afiks

Ciri penutur jati bahasa Maanyan ketika berbahasa Indonesia adalah menghilangkan afiks tertentu dan hanya memunculkan bentuk dasar. Perhatikan kalimat-kalimat berikut.

### Bentuk Berkarakteristik Afiks

1. Mereka ke lubuk kalau kemarau. Ikan *kumpul* di sana.
2. Kami sudah jarang *mancing* di Sungai Sirau. Ikannya sedikit sekarang.
3. Kami tidak pergi. Tidak ada yang *tunggu* rumah.
4. Si Adik tidak *sekolah*. Berhenti kelas dua kemarin.
5. Pohon-pohon tahun ini *tidak ada buah*.

Tipe kalimat seperti kalimat (1)—(4) di atas sering muncul karena ketidakyakinan penutur untuk menggunakan afiks tertentu dalam bahasa Indonesia. Kalimat-kalimat yang seharusnya untuk kalimat (1a)—(4a) tersebut.

- (1a) Mereka ke lubuk kalau kemarau. Ikan ***berkumpul*** di sana.
- (2a) Kami sudah jarang ***memancing*** di Sungai Sirau. Ikannya sedikit sekarang.
- (3a) Kami tidak pergi. Tidak ada yang ***menunggu*** rumah.
- (4a) Si Adik tidak ***bersekolah***. (Ia) berhenti kelas dua kemarin.

Tipe kalimat seperti kalimat (5) di atas sering muncul untuk menghindari penggunaan afiks. Kalimat (5) dihasilkan untuk mengungkapkan bahwa pohon buah-buahan musiman yang seharusnya berbuah setiap tahun pada tahun ini tidak berbuah seperti biasanya. Kalimat (5) memang digunakan di dalam bahasa Indonesia, tetapi tingkat keformalannya rendah. Oleh karena itu, kalimat alternatif untuk keformalan adalah kalimat berikut.

- (5a) Pohon-pohon ***tidak berbuah*** tahun ini.



### **Karakteristik Klitik**

Ciri penutur jati bahasa Maanyan ketika berbahasa Indonesia adalah pemakaian klitik. Perhatikan kalimat-kalimat berikut.

#### **Bentuk Berkarakteristik Klitik**

6. Ambil sekarang. Nanti *ambilku* kalau kamu tidak ambil.
7. Bu, *makanku*, ya, makanan di atas meja ini.
8. Ya, *makanmu* saja semuanya.
9. Tolong, *antarmu* ikan yang di plastik itu ke tempat Ineh Teah.
10. Lalu, *minumnya* air yang ada di gelas merah itu.

Keseluruhan klitik yang dikenal penutur bahasa Maanyan dalam bahasa Maanyan hanya klitik yang tempatnya di akhir kata menyebabkan penutur umumnya menyamaratakan penempatan klitik bahasa Indonesia juga di akhir kata. Artinya, bahasa Maanyan hanya mempunyai enklitik. Hal ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang memiliki proklitik dan enklitik. Dalam bahasa Indonesia, tempat klitik berbeda berdasarkan bentuk dasar yang dilekatinya. Jika melekat pada bentuk dasar nomina dan adjektiva, klitik tersebut bertempat di akhir kata yang dilekatinya atau enklitik. Jika melekat pada bentuk dasar verba, klitik tersebut bertempat di awal kata yang dilekatinya atau proklitik. Oleh karena itu, kecenderungan penutur jati bahasa Maanyan ketika berbahasa Indonesia adalah selalu menempatkan klitik sebagai enklitik walaupun melekat pada bentuk dasar verba. Kalimat-kalimat dengan penempatan klitik yang seharusnya adalah pada kalimat (6a)—(9a) berikut, sedangkan klitik pada kalimat (10) tidak menjadi klitik lagi di dalam kalimat (10a).

- (6a) Ambil sekarang. Nanti *kuambil* kalau kamu tidak ambil.
- (7a) Bu, *kumakan*, ya, makanan di atas meja ini.
- (8a) Ya, *kaumakan* saja semuanya.
- (9a) Tolong, *kauantar* ikan yang di plastik itu ke rumah Ineh Teah.
- (10a) Lalu, *dia minum* air yang ada di gelas merah itu.

### **Karakteristik Pemarkah Persona**

Ciri penutur jati bahasa Maanyan ketika berbahasa Indonesia adalah pemakaian pemarkah persona atau kata sandang *si*. Hal ini dipengaruhi penggunaan pemarkah persona *hi* 'si' dalam bahasa Maanyan. Perhatikan kalimat-kalimat berikut.

#### **Bentuk Berkarakteristik Pemarkah Persona**

11. *Si Ge* tidak sekolah karena *si Itak* tidak bisa mengantar dia.
12. *Si Waris* dengan ibunya makan.
13. *Si Ayah Sit* bicara kepada *si Ilai* soal kebun di Bana.
14. Pagi tadi *si Utuh Halus* sudah datang mengambil buah.

Dalam bahasa Indonesia *si* merupakan artikula yang menominalkan. Artikula ini dapat mengacu ke makna tunggal atau generik (Alwi, Hasan, dkk., 1998: 311). Artikula tersebut dipakai untuk mengiringi nama orang, tetapi dipakai juga untuk



menunjukkan perasaan negatif pembicara mengenai orang yang dirujuknya. Dalam bahasa Indonesia, pemakaian artikula *si* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. dipakai di depan nama diri pada ragam akrab atau kurang hormat',
2. dipakai di depan kata untuk mengkhususkan orang yang melakukan sesuatu atau terkena sesuatu,
3. dipakai di depan nomina untuk dipakai sebagai timangan, panggilan, atau ejekan, dan
4. dipakai dalam bentuk verba yang menandakan dirinya menjadi bersifat tertentu.

Dalam bahasa Maanyan, *hi* 'si' umum digunakan tanpa tujuan sebagaimana artikula dalam bahasa Indonesia tersebut. *Hi* dipakai sebagai artikel nomina yang diacu tanpa maksud untuk menunjukkan perasaan negatif, kurang hormat, dan ejekan. *Hi* merupakan pemarah persona yang selalu digunakan sebelum nama orang dan nomina kekerabatan dalam pengacuan atau sapaan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia penutur jati bahasa Maanyan tidak mempertimbangkan aspek penggunaan *si*, kecuali anggapan bahwa *si* merupakan padanan dari *hi* dalam bahasa jatinya. Kalimat-kalimat dengan penggunaan artikula *si* yang seharusnya adalah pada kalimat (11a)—(14a) berikut.

(11a) *Ge* tidak sekolah karena *Itak* tidak bisa mengantar dia.

(12a) *Waris* dengan ibunya makan.

(13a) *Ayah Sit* bicara kepada *Ilai* soal kebun di Bana.

(14a) Pagi tadi *Utuh Halus* sudah datang mengambil buah.

### **Karakteristik Reduplikasi**

Ciri penutur jati bahasa Maanyan ketika berbahasa Indonesia adalah pemakaian reduplikasi. Penggunaannya umumnya disebabkan ketidakmampuan penutur jati bahasa Maanyan untuk menemukan secara cepat padanan kata tersebut di dalam bahasa Indonesia. Padanan dalam bentuk kata yang umumnya dipakai oleh penutur tidak mewakili sepenuhnya maksud penutur. Oleh karena itu, penutur lebih sering mengungkapkannya dengan tetap menggunakan kata dari bahasa jati penutur. Perhatikan kalimat-kalimat berikut.

### **Bentuk Berkarakteristik Reduplikasi**

15. Nenek saya tidak pernah bisa diam; selalu *rarituk*; tidak tahu kerja apa saja.

16. Malam seperti ini di tengah hutan akan *maieng-maituk*, tidak ada cahaya.

17. Kami tidak tahu berapa luas tanah ini, tapi *kayu-kaya* pasti banyak di sini.

*Rarituk* pada kalimat (15) merupakan bentuk ulang *rituk-rituk* yang menjadi *rariktuk* 'mengerjakan sesuatu terus-menerus dengan tidak banyak suara'. Perulangan seperti ini juga terdapat di dalam bahasa Indonesia, seperti *laki-laki* menjadi *lelaki*. Reduplikasi dalam bahasa Maanyan pada kalimat (15)—(17) tersebut dapat dipadankan dengan bentuk pada kalimat (15a)—(17a) berikut.

(15a) Nenek saya tidak pernah bisa diam; selalu *ada saja yang beliau kerjakan*; tidak tahu kerja apa saja.



- (16a) Malam seperti ini di tengah hutan akan *gelap gulita*, tidak ada cahaya.  
(17a) Kami tidak tahu berapa luas tanah ini, tetapi *berbagai jenis pohon* pasti banyak di sini.

### Variasi Sintaksis

Kekhasan bahasa Indonesia penutur jati bahasa Maanyan pada tataran sintaksis ini dapat digolongkan dalam empat golongan karakteristik, yaitu karakteristik *yang*, karakteristik imperatif, karakteristik pemarkah jumlah pada pronominal persona jamak, dan karakteristik pemarkah wakil/label pada pronomina persona ketiga jamak.

### Karakteristik *yang*

Ciri penutur jati bahasa Maanyan pada tataran sintaksis ketika berbahasa Indonesia adalah dalam menggunakan bentuk *yang*. Perhatikan kalimat berikut.

#### Bentuk Berkarakteristik *yang*

18. Aku *yang* tidak ikut, hanya mengantar saja.
19. Dia *yang* ikut mencuci, aku *yang* tidak.
20. Si Itak *yang* tidak mau makan.
21. Aduh, *yang* merahnya.
22. Benar-benar *yang* pelitnya dia itu.

Penutur jati bahasa Maanyan umumnya memadikan bentuk *saq* atau *isaq* dalam bahasa Maanyan dengan *yang* dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bentuk sebagaimana kalimat (18)—(22) tersebut digunakan oleh penutur asli bahasa Maanyan ketika berbahasa Indonesia. Penggunaan *yang* pada kalimat-kalimat tersebut karena fungsi *yang* dalam bahasa Indonesia sama dengan salah satu fungsi *saq* atau *isaq* dalam bahasa Maanyan. Fungsi tersebut adalah sebagai artikula yang menominalkan yang bersifat definit dalam klausa relatif, baik dipakai dalam klausa relatif restriktif maupun dalam klausa relatif takrestriktif.

Misalnya: (23) Ia *saq* muneng hang lewuq here nai ngalatni.

‘Anak *yang* tinggal di rumah mereka itu mencurinya.’

- (24) Daupni *saq* muneng hang Jaar matei hangkariwe.

‘Iparnya *yang* tinggal di Jaar meninggal kemarin.’

- (25) Daupni, *saq* muneng hang Jaar, matei hangkariwe. ‘Iparnya, *yang* tinggal di Jaar, meninggal kemarin.’

Akan tetapi, fungsi *saq* atau *isaq* dalam bahasa Maanyan tidak terbatas hanya sebagaimana fungsi *yang* dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Maanyan, *saq* atau *isaq* berfungsi sebagai partikel penegas.

Misalnya: (26) Aku *saq* puang umma, ekat ngatet ai.

‘Aku *memang* tidak ikut, cuma mengantar saja.’

- (27) Hi Itak *saq* puang hakun kuman.

‘Neneklah tidak mau makan.’

- (28) Hahaq *saq* riangni.

Aduh *betapa* merahnya.



Fungsi *saq/isaq* dalam bahasa Maanyan seperti yang terdapat pada kalimat (26)--(28) inilah yang mendasari dituturkannya kalimat (18)--(22) di atas. Dengan demikian, kalimat yang seharusnya untuk menggantikan kalimat berartikula *yang*, yaitu kalimat (18)--(22) di atas, adalah kalimat (18a)--(22a) berikut.

- (18a) Aku tidak ikut, aku hanya mengantar.
- (19a) Dialah ikut mencuci, aku yang tidak.
- (20a) Itaklah *yang* tidak mau makan.
- (21a) Aduh, *betapa* merahnya.
- (22a) Benar-benar *sangat* pelit dia itu.

### **Karakteristik Imperatif**

Ciri lain penutur jati bahasa Maanyan ketika berbahasa Indonesia adalah dalam menggunakan bentuk imperatif. Perhatikan kalimat-kalimat berikut.

#### **Bentuk Berkarakteristik Imperatif**

- 29. *Lihat kalian* pohon durian itu, buahnya banyak sekali!
- 30. *Ambil kamu* gelas dari meja itu!
- 31. *Buang kamu saja* buah itu karena di rumah banyak yang lebih bagus!
- 32. *Rasa kamu sendiri* kelakuanmu yang buruk itu!

Kalimat (29)--(32) dipergunakan oleh penutur jati bahasa Maanyan ketika berbahasa Indonesia karena dalam pikiran penutur telah terpola kaidah imperatif dalam bahasa Maanyan, yaitu verba dasar + pronomina persona kedua/sapaan. Kalimat (29)--(32) di atas merupakan imbalan kalimat bahasa Maanyan berikut.

(33) *Tantau naun* kakau ruyan yiru, wuani rama tuu. lihat kalian pohon durian itu, buahnya banyak sekali

(34) *Alapnu* gelas teka meja yiru! *Ambil (ka)mu* gelas dari meja itu

(35) *Umpenuai* wua iru *dayaq* hang *lewuq* rama *saq* labis maqeh! *buang (ka)mu* saja buah itu karena di rumah banyak yang lebih bagus

(36) *Inamnuraqerai* wangunnu *isaq* lungaq kaliri! *rasa (ka)mu* sendiri kelakuanmu yang buruk itu

Oleh karena itu, seharusnya bentuk imperatif tersebut berpola imperatif bahasa Indonesia

sebagaimana kalimat (29a)—(32a) berikut.

- (29a) *Coba kalian* lihat pohon durian itu, buahnya banyak sekali!
- (30a) *Tolong kamu* ambil gelas dari meja itu!
- (31a) *Kamu* buang saja buah itu karena di rumah banyak yang lebih bagus!
- (32a) *Kamu* rasakan sendiri kelakuanmu yang buruk itu!





## Karakteristik Pemarkah Jumlah pada Pronomina Persona Jamak

Ciri penutur jati bahasa Maanyan ketika berbahasa Indonesia adalah dalam menggunakan bentuk pemarkah jumlah pada pronomina persona jamak. Perhatikan kalimat-kalimat berikut.

### Bentuk Berkarakteristik Pemarkah Jumlah

37. *Kalian dua* ditunggu ibu di rumah.
38. *Mereka lima* tidak pernah datang ke tempat *mereka* Tulus.
39. *Kalian dua Am<sup>b</sup>ah Ge* harus pergi menjenguk kakek.
40. *Kami empat kakekmu* tidak ikut pemilu tahun lalu.

Dalam bahasa Maanyan, frasa pronominal yang berpengacu makna kelompok berpola pronomina persona jamak + numeralia pokok + pemarkah wakil/label. Pola tersebut tampak pada imbangan kalimat (37)—(40) pada kalimat (41)—(44) berikut.

- (41) *Naun r<sup>ueh</sup> naanrei ineh hang lewuq.*  
2PL *dua* PASS-tunggu ibu PREP rumah
- (42) *Here dime pasuah hawi ma uneng here Tulus.*  
3PL *lima* NEG-pernah datang PREP tempat 3PL WAKIL-Tulus
- (43) *Naun r<sup>ueh</sup> Am<sup>b</sup>ah Ge musti hawi nyuwuk hi kakah.*  
2PL *dua* WAKIL-Ayah Ge harus datang menjenguk PM kakek
- (44) *Kami epat Kakah puang um<sup>ba</sup> pemilu taqun yari.*  
1PL.excl empat WKL-kakek NEG *ikut* *pemilu* tahun lalu

Oleh karena itu, untuk kalimat (36)—(39) tersebut, kalimat bahasa Indonesia yang seharusnya digunakan adalah kalimat (36a)—(39a) berikut.

- (40a) *Kalian berdua* ditunggu ibu di rumah.
- (41a) *Kami berlima* tidak pernah datang ke tempat Tulus (dan keluarga).
- (42a) *Kamu dan Abah Ge* harus pergi menjenguk kakek.
- (43a) *Kami berempat* (aku, X1, X2, dan kakek) tidak ikut pemilu tahun lalu.

## Karakteristik Pemarkah Wakil pada Pronomina Persona Ketiga Jamak

Ciri penutur jati bahasa Maanyan ketika berbahasa Indonesia adalah dalam menggunakan bentuk pemarkah wakil dengan pronominal persona ketiga *mereka*. Perhatikan kalimat-kalimat berikut.

### Bentuk Berkarakteristik Pemarkah Wakil

45. *Kata mereka Perkadi*, penerimaan pegawai sekitar November nanti.
46. Pohon itu tumbang sampai ke halaman rumah *mereka* *Ilai*.
47. *Pesan mereka ibu*, kamu tidak usah ke ladang hari ini.
48. *Kata mereka kakak*, bapak makan sendiri nanti malam.

Kejamakan dalam pronomina persona bahasa Maanyan harus selalu jelas dalam hal jumlah, wakil, dan/atau labelnya. Pronomina persona jamak tanpa pemarkah jumlah, wakil, dan/atau label dapat digunakan di dalam kalimat jika



telah ada konteks atau informasi sebelumnya yang menunjukkan informasi tentang jumlah, wakil, dan/atau label dari persona pronomina yang dimaksud. Dalam hal penggunaan pronomina persona ketiga jamak, dinyatakan dalam pola pronomina persona jamak + pemarkah wakil. Pemarkah wakil tersebut adalah persona yang bagi penutur bernilai sebagai wakil (penanggung jawab) terhadap isi tuturan. Perhatikan kalimat berikut.

(49) Eau *here kakah*, hanyu naterime bagawi. Tuqu sa?

kata 3PL                      kakek 2SG PASS-terima bekerja benar QM  
'Kata kakek dan X(dan X), kamu diterima bekerja. Benarkah?'

Kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa yang mengatakan *hanyu natarime bagawi* 'kamu diterima bekerja' tidak hanya *kakah* 'kakek', tetapi di samping *kakah* juga ada yang mengatakan seperti itu. Dalam hal ini mungkin nenek atau anggota keluarga lainnya. Pola kalimat seperti itu menjadikan bahasa Indonesia yang penutur itu hasilkan berpola sama seperti bahasa ibunya, yaitu bahasa Maanyan. Oleh karena itu, untuk kalimat (45)—

(48), kalimat bahasa Indonesia yang seharusnya digunakan adalah kalimat (45a)—  
(48c)  
berikut.

(45a) *Kata Perkadi dan temannya*, penerimaan pegawai sekitar November nanti.

(45b) *Kata Perkadi dan pegawai BKD lainnya*, penerimaan pegawai sekitar November nanti.

(45c) *Kata mereka*, penerimaan pegawai sekitar November nanti.

(46a) Pohon itu tumbang sampai ke *halaman rumah Ilai dan ayahnya*.

(46b) Pohon itu tumbang sampai ke *halaman rumah Ilai dan adik-adiknya*.

(46c) Pohon itu tumbang sampai ke *halaman rumah mereka*.

(47a) *Pesan ibu dan bapak*, kamu tidak usah ke ladang hari ini.

(47b) *Pesan ibu dan semua orang yang ada di rumah*, kamu tidak usah ke ladang hari ini.

(47c) *Pesan mereka*, kamu tidak usah ke ladang hari ini.

(48a) *Kata kakak dan ibu*, bapak makan sendiri nanti malam.

(48b) *Kata kakak dan istrinya*, bapak makan sendiri nanti malam.

(48c) *Kata mereka*, bapak makan sendiri nanti malam.

### **Faktor Penyebab Variasi Bahasa Indonesia Penutur Jati Bahasa Maanyan**

Uraian tentang karakteristik bahasa Indonesia penutur jati bahasa Maanyan pada bagian di atas menunjukkan secara jelas salah satu penyebab adanya variasi bahasa Indonesia yang dituturkan oleh penutur jati bahasa Maanyan. Penyebab struktur bahasa jati penutur itu dikategorikan sebagai faktor internal adanya variasi bahasa dilihat dari latar belakang penuturnya.

Selain faktor internal, variasi bahasa juga disebabkan oleh faktor eksternal. Sebagai masyarakat multikultural dan telah menjadi multilingual, penutur bahasa Maanyan hidup di dalam situasi kebahasaan karena faktor sosial dan ekonomi yang kompleks. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.



- (1) Untuk dapat mengakses pendidikan, orang Maanyan harus dapat berbahasa Indonesia. Sebagian guru yang berasal dari luar Pulau Kalimantan atau bukan orang Maanyan mau tidak mau membuat orang Maanyan harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, begitu juga dengan buku pelajaran dan hal-hal yang terkait dengan dunia pendidikan. Orang Maanyan yang telah menjadi orang tua dan merasakan bahwa dahulunya ia mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran karena kendala bahasa berusaha untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara dengan anak-anaknya. Mereka berharap agar anaknya memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik sehingga dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Pada umumnya, para orang tua ini berbahasa Indonesia dengan karakteristik yang dijelaskan pada bagian 4.1 sampai 4.3 di atas. Bahasa Indonesia orang tua ini mau tidak mau memengaruhi bahasa Indonesia anak-anaknya.
- (2) Untuk komunikasi dalam pekerjaan dalam pemerintahan, orang Maanyan yang bekerja pada instansi pemerintah akan diwajibkan berbahasa Indonesia pada situasi formal. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa Indonesia wajib dimiliki jika orang Maanyan bekerja atau berhubungan dengan orang-orang yang bekerja pada instansi pemerintah. Selain dalam pekerjaan di sektor formal pemerintahan, dengan banyaknya perusahaan pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, orang Maanyan pun akan dapat berkomunikasi dengan pekerja yang berasal dari luar Kalimantan dengan baik jika ia memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (3) Dalam komunikasi keagamaan, misalnya dalam khotbah Jumat di masjid, tata ibadah dan kitab yang digunakan di gereja, diperlukan kemampuan berbahasa Indonesia. Hal ini karena khotbah Jumat dan pengumuman dari masjid menggunakan bahasa Indonesia, begitu juga dalam ibadah di gereja.
- (4) Untuk dapat menikmati kemajuan teknologi di bidang komunikasi, yaitu dengan adanya radio, televisi, dan internet, orang Maanyan merasa wajib memiliki kemampuan berbahasa Indonesia karena umumnya siaran atau publikasi menggunakan bahasa Indonesia.
- (5) Untuk komunikasi di pasar ataupun bisnis (misalnya penjualan getah sadapan karet, hasil hutan, dll.) dengan pedagang yang umumnya adalah orang Banjar, orang Maanyan harus memiliki kemampuan berbahasa Banjar. Jika transaksi itu dilakukan dengan pendatang dari luar Kalimantan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, orang Maanyan dituntut menjadi multilingual karena berada di dalam masyarakat yang multilingual, baik karena kontak bahasa alami dengan bahasa-bahasa di sekitarnya maupun karena ketentuan negara tentang bahasa Indonesia. Kedua, variasi bahasa Indonesia yang dituturkan oleh penutur jati bahasa Maanyan disebabkan faktor



internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pengaruh bahasa jati penutur, yaitu bahasa Maanyan, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan situasi sosial dan ekonomi, yaitu untuk akses pendidikan, pekerjaan, keagamaan, hiburan, dan perdagangan. Ketiga, variasi bahasa Indonesia penutur jati bahasa Maanyan dapat dilihat dalam karakteristik bahasa Indonesia penutur jati bahasa Maanyan. Karakteristik tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok tataran linguistik yang termasuk struktur bahasa. Tataran linguistik tersebut adalah tataran fonologi, tataran morfologi, dan tataran sintaksis.

Dalam internalisasi bahasa Indonesia, variasi bahasa Indonesia yang dipengaruhi bahasa daerah dan faktor yang menyebabkan variasi bahasa tersebut tidak dapat diabaikan oleh pihak yang menangani ataupun terlibat dalam internalisasi tersebut. Bahasa Indonesia dengan variannya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan orang Indonesia yang umumnya merupakan multibahasawan. Karena internalisasi bahasa Indonesia melibatkan juga penutur bahasa yang juga adalah penutur atau anggota masyarakat tutur bahasa lainnya, variasi bahasa karena pengaruh bahasa jati penutur dapat dilihat sebagai kekayaan bahasa Indonesia dan sarana internalisasi bahasa Indonesia standar.

Untuk dapat mengetahui kemultilingualan orang Maanyan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kecanggihan teknologi komunikasi menyebabkan sejak lahir, orang Maanyan tidak hanya berkontak dengan bahasa yang ada di sekitarnya, tetapi juga dengan bahasa lain. Jika sebelumnya kontak dengan bahasa Indonesia dan bahasa lainnya terbatas, tontonan melalui televisi atau media internet menyebabkan adanya kontak dengan bahasa lain secara luas dan intensif. Hal ini diperkirakan memberi perubahan pada masyarakat tutur Maanyan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. (1998). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. 5 Desember 2017. <https://kalteng.bps.go.id/>.
- Etnologue. *Ma'anyan*. 15 November 2017. <https://www.ethnologue.com/language/mhy>.
- Etnologue. *Banjar*. 17 November 2017. <https://www.ethnologue.com/language/bjy>.
- Gunarwan, Asim. (2002). *Pedoman Penelitian Pemakaian Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, Depdikbud.
- Iper, Dunis, dkk. (1998). *Morfologi Bahasa Maanyan*. Palangkaraya: Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Tengah.
- (2000). *Fonologi Bahasa Maanyan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kawi, Djantera. (1984). *Struktur Bahasa Maanyan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Ngabut, Yus, C. (1985). *Dialek Bahasa Daerah di Kabupaten Barito Selatan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Thomason, Sarah G. (2001). *Language Contact: An Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press.



- Verhaar, J.W.M. (1996). *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wardhaugh, Ronald dan Janet M. Fuller. (2016). *An Introduction to Sociolinguistics (Seventh Edition)*. West Sussex: Wiley Blackwell.
- Winford, Donald. "Contact and Borrowing" dalam Raymond Hickey. (2013). *Language Contact*. West Sussex: Wiley-Blackwell.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 2 Kelompok 8**

Pembicara : Kity Karenisa  
Judul Makalah : “Variasi Bahasa Indonesia Penutur Jati Bahasa Maanyan dalam Internalisasi Bahasa Indonesia”  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 19.30—21.00  
Moderator : Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.  
Pencatat : Retno Handayani

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Bahasa Indonesia menjadi bervariasi karena kita berasal dari berbagai latar bahasa daerah yang berbeda.
2. Maanyan adalah salah satu Suku Dayak di Kalimantan Selatan, masuk dalam keluarga Barito. Orang-orang Maanyan terlahir sebagai multilingual. Bahasa Maanyan sebagai bahasa ibu yang digunakan dalam sehari-hari, tingkat awal pendidikan ketika gurunya berasal dari Suku Maanyan. Orang Maanyan juga bisa berbahasa Banjar. Orang Maanyan pasti bisa berbahasa Indonesia. Kemultilingualan orang Maanyan dipengaruhi oleh kontak bahasa Maanyan dengan bahasa Indonesia, bahasa Maanyan sebagai bahasa dominan dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nondominan.
3. Variasi bahasa terlihat dari fonologi, morfologi, dan sintaksis. Perilaku bahasa yang sebenarnya diamati dalam penelitian ini (kata frasa orang Maanyan yang berbahasa Indonesia).
4. Membandingkan bahasa yang dituturkan oleh orang Maanyan dan bahasa Indonesia.
5. Variasi fonologis dengan karakteristik nasal dengan bunyi bersuara, /u/, dan /e/.
6. Bunyi-bunyi nasal dipengaruhi oleh bunyi-bunyi yang ada setelahnya.
7. Karakteristik /u/ dari /o../boto/ menjadi /butul/ karena bahasa Maanyan tidak ada fonem bahasa /o/.
8. Karakteristik /e/ sebagai pengganti bunyi //
9. Karakteristik afiks, kata dalam bahasa Maanyan tidak menggunakan afiks
10. Karakteristik kumakan, makanku, kau makan menjadi makanmu, posisi selalu enklitik (diakhir)
11. Karakteristik pemarkah persona, penggunaan *si* dalam bahasa Maanyan konsisten digunakan sebelum nama orang. *Si* dianggap padanan dari *hi* dalam bahasa Maanyan.
12. Karakteristik reduplikasi
13. Karakteristik sintaksis, yang imperaktif, jumlah, dan wakil.
14. Variasi tersebut memengaruhi orang Maanyan berbahasa Indonesia (internal).
15. Eksternal, orang Maanyan harus bisa berbahasa Indonesia. Guru berasal dari luar Pulau Kalimantan. Karakteristik bahasa Indonesia diturunkan oleh orang tua ke anaknya. Kitab harus berbahasa Indonesia. Orang Maanyan mau tidak



mau harus bisa berbahasa Indonesia. Bagaimana menginternalisasi bahasa Indoensia terhadap penutur bahasa daerah.

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Elis  
Instansi : UNPAD

#### **Pertanyaan:**

Ketika Ibu Kity membicarakan dengan ada kesamaan bahasa Maanyan dengan bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda, bahasa tulis *si* tidak sesuai dengan aturan, tetapi dari tuturan lisan terlontar. Apakah dalam bahasa Maanyan lisan/tulisan ada. Apakah ada pemarkah aspek dalam bahasa Maanyan?

#### **Jawaban:**

Penelitian ini adalah bahasa lisan, saya hanya dapat menginformasikan variasi ini hanya dalam bahasa lisan. Belum ada pemarkah dalam bahasa Maanyan. Pemarkah persona selalu ada.

#### **Penanya 2**

Nama : Prof. Dr. Emi Emilia  
Instansi : PPSDK

#### **Pertanyaan:**

Tadi contoh /butung/ dan /mengeng/, apakah yang mengucapkan adalah orang yang berpendidikan. Apakah tidak ada vokal /o/? *Language defifation* atau *language variation*? Mereka hanya berdasarkan pendengaran saja bukan tulisan.

#### **Jawaban:**

Data ini diambil dari orang-orang Maanyan yang paling tidak berpendidikan SMA. Mereka mengajarkan bahasa ini kepada anak-anaknya. Ketidakmampuan orang Maanyan dalam menghasilkan bunyi /o/. Harus ada penelitian fonologis lebih lanjut, mengapa orang-orang Maanyan tidak dapat mengucapkan bunyi /o/.

#### **Penanya 3**

Nama : Supriyanto Widodo  
Instansi : Kepala Balai Bahasa Sulawesi Utara

#### **Pertanyaan:**

Di beberapa daerah, bahasa daerah berpengaruh dalam bahasa Indonesia untuk anak-anak daerah. Apakah ada kategori praktis yang bisa memengaruhi pemerolehan bahasa Indonesia dari bahasa Maanyan? Ada campur kode yang mestinya bisa dihindari. Ini arahnya adalah perencanaan bahasa.

#### **Jawaban:**

Ketika penutur bahasa dominan menuturkan bahasa nondominan memang ada pengaruh dalam bahasa nondominan. Arah kebijakan perencanaan bahasa kita ditentukan seperti apa karena berlatar bahasa ibu yang berbeda-beda. Belum ada



standar, variasi-variasi bahasa seperti ini harus dipertimbangkan dalam perencanaan bahasa.

**Penanya 4**

Nama : Junayah  
Instansi : Purnabakti Badan Bahasa

**Pertanyaan :**

Apakah dalam bahasa Maanyan tidak ada bentuk aktif? Kalau tidak ada bentuk aktif, mungkin juga tidak ada bentuk pasif. Apakah kalimat ini alami, *nya tadi nya* apa? *Nya* orang ketiga atau *nya* sama dengan *ke--an*?

**Jawaban:**

Tentu saja ada, hanya digunakan nasal. Bentuk pasif *-nya* pun ada. Tetapi belum ada penelitian mana yang lebih banyak digunakan. Kalimat ini betul-betul digunakan oleh orang Maanyan dalam bahasa Indonesia. Itu sama dengan *-nya*, sama dengan *-nya* dalam bahasa Indonesia.

**Penanya 5**

Nama : Istiqomah  
Instansi : Institut Agama Islam Aceh

**Pertanyaan:**

Bagaimana proses dokumentasi dalam penelitian ini? Berapa orang? Siapa responden yang dilibatkan dalam proses penelitian ini?

**Jawaban:**

Sesuatu yang besar jika berbicara tentang dokumentasi bahasa. Penelitian paling tua 1951, penerjemahan injil. Penelitian perbandingan bahasa Maanyan dengan bahasa Malagasi dan ditemukan kekerabatan antara kedua bahasa itu. Proyek-proyek sebelum Badan Bahasa membantu dalam dokumentasi bahasa Maanyan. Kalau saya hanya melihat hal-hal kecil yang dapat saya jangkau. Satu lingkungan saya, sekitar 20 orang. Tidak ada pemangku adat karena hanya dilibatkan dalam acara adat, tetapi orang-orang tua yang dituakan.

**Penanya 6**

Nama : Widi Suharto  
Instansi : Tulungagung

**Pertanyaan:**

Ada sebuah perbandingan dengan bahasa India. Mungkinkah ada kesamaan? Apakah di sana ada beragam suku juga lalu diambil satu bahasa untuk menyatukan?

**Jawaban:**

Perbandingan bahasa-bahasa nusantara, ada semacam ketertarikan itu. Saya pernah memerankan tokoh dari bahasa Batak. Apakah ada rekaman-rekaman





penutur bahasa Maanyan agar saya bisa mendengarkan bunyi-bunyi bahasa Maanyan dengan baik?

Saya tidak memiliki rekaman bahasa Maanyan. Saya bisa mengucapkan /o/ dan bunyi bahasa lain karena pergaulan bahasa saya luas sehingga berkomunikasi dengan penutur bahasa lain sehingga membuat saya bisa berbicara bahasa Maanyan.

**Isu-Isu Penting:**

1. Ketika penutur bahasa dominan menuturkan bahasa nondominan memang ada pengaruh dalam bahasa nondominan, baik dari segi fonologis, morfologis, dan sintaksis. Arah kebijakan perencanaan bahasa kita ditentukan seperti apa karena masyarakat Indonesia berlatar bahasa ibu yang berbeda-beda. Belum ada standar untuk menentukan arah kebijakan perencanaan bahasa. Variasi-variasi bahasa atau karakteristik bahasa daerah harus dipertimbangkan dalam perencanaan bahasa.
2. Dari sisi kebahasaan, bahasa Indonesia berpeluang dan sangat layak untuk menjadi bahasa ilmu pengetahuan karena dapat mewartakan kepentingan untuk mendokumentasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia. Cara untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi suatu negara dan cara menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi internasional akan berlaku baik jika dilihat dari sudut potensi bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia sebagai pemiliknya.



## 9. Literasi Berbasis Aplikasi Digital sebagai Upaya Politik Bahasa di Sekolah Menengah

### LITERASI BERBASIS APLIKASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA POLITIK BAHASA DI SEKOLAH MENENGAH

Nurhaidah<sup>a</sup>, Muhamad Zainal Arifin<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup> Universitas Pendidikan Indonesia  
nurhaidah@upi.edu

#### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya asing yang memberikan dampak terhadap stabilitas fungsi bahasa Indonesia. Keadaan tersebut dibuktikan oleh istilah asing yang digunakan baik dalam iklan, surat kabar, atau naskah publikasi, yang juga merambah ke dunia pendidikan. Selain itu, di tengah beragamnya bahasa daerah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau formal sering kali mendapat interferensi bahkan dialihfungsikan. Oleh karenanya, diperlukan upaya dalam hal pembinaan, pengembangan, dan pemeliharaan bahasa Indonesia dari berbagai bidang yang dikenal dengan politik bahasa. Pendidikan merupakan bidang yang dinilai tepat sebagai wadah pengaplikasian politik bahasa dan salah satu di antaranya dengan literasi. Selain sebagai wadah menyalurkan politik bahasa, literasi dipilih sekaligus memberikan solusi permasalahan kurangnya kemampuan literasi siswa. Fakta sebaliknya terjadi pada besarnya kuantitas pengguna internet dan daya tarik siswa terhadap bidang teknologi. Kedua hal yang saling kontradiktif tersebut dijumpai oleh usaha memadukan literasi dengan teknologi yang dikenal dengan literasi digital. Literasi digital saat ini sedang marak disosialisasikan dan diterapkan di bidang pendidikan. Akan tetapi, kelengkapan bahan bacaan saat ini belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kelengkapan bahan bacaan tanpa mengesampingkan aspek konten, bahasa, dan tingkat kemampuan kognitif pembaca merupakan hal yang penting guna memfasilitasi literasi. Peluang tersebut dapat diisi dengan menciptakan bahan ajar nonformal yang telah distandardisasi dalam bentuk kurasi digital tanpa mengesampingkan tujuan pembinaan dan pemeliharaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan konsep literasi berbasis aplikasi digital sebagai upaya politik bahasa di sekolah menengah dengan metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data studi pustaka berupa hasil penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

**Kata-kata kunci:** literasi berbasis aplikasi digital, politik bahasa, sekolah menengah

#### Abstract

*This research is motivated by the development of the development of science technology and culture that provides impact to the stability of the function of the Indonesian language. The situation that is proven by the use of new terms in advertisements, newspapers, or publications, which is also being extended to the*



*education field and formal speeches. Moreover, among the variety of local language, the function of the Indonesian language as an official or formal language often gets interference or even being misused. Therefore, efforts are needed as a guidance, development and maintenance of Indonesia language from various fields which is known as language politic one of them with literacy. Education is an appropriate field due to the rules of language use which is clearly defined as the language of instruction. Politic language in education can be implemented by strengthening the role of Indonesian language in learning. The process can be applied by introducing Indonesian language through the literacy. Besides, literacy is chosen as well as providing solutions to the problem of students' literacy problem. On the other hand, the big quantity of internet users and students' interest in the field of technology is found. These contradictories fact are tied by integrating literacy with technology which is defined as digital literacy. Digital literacy is currently being socialized to the society and education field. However, reading materials have not been being taken into account by the government. The completeness of reading materials without putting aside some aspects, such as content, language, and cognitive abilities of readers is essential to facilitate literacy. These opportunities can be fulfilled by constructing non-formal learning materials which have been standardized in digital curation without putting aside the aims of coaching and Indonesian language preservation. Therefore, this research offers a digital application-based concept of literacy as a language political effort in middle schools with qualitative research methods and data collection techniques using literature studies in the form of the results of previous research and theories relevant to this study.*

**Keywords:** *literation based on digital applications, language politics, middle school*

## **PENDAHULUAN**

Maraknya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya asing saat ini tidak terlepas dari peran bahasa sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, bahasa merupakan komponen yang mendapat dampak dari perkembangan tersebut. Satu di antaranya adalah penggunaan bahasa asing yang mulai menggeser fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek. Munsyi (Sumadyo, 2010, hlm. 170) mengungkapkan bahwa saat ini bahasa Indonesia telah sampai pada perkembangan yang paling menyedihkan, menjengkelkan, sekaligus juga memuakkan. Lebih lanjut Sumadyo (2010, hlm. 175) mengatakan bahwa orang asing justru lebih menyukai dan menghargai bahasa Indonesia daripada orang Indonesia itu sendiri. Jika hal ini terus berlanjut, kekhawatiran bahwa bahasa Indonesia akan “tergantikan” oleh bahasa asing mungkin saja akan terbukti. Keadaan tersebut dapat dilihat juga melalui penggunaan istilah asing baik dalam iklan, surat kabar, atau naskah-naskah publikasi maupun dunia pendidikan.

Adanya hal tersebut mengindikasikan ketidakstabilan fungsi bahasa Indonesia. Ketidakstabilan fungsi bahasa Indonesia bukan karena tidak adanya kebijakan bahasa, melainkan, sebagaimana dikemukakan di awal karena bahasa merupakan alat perkembangan ilmu dan teknologi yang akan selalu mendapat dampak dari hal tersebut. Oleh karenanya, kebijakan bahasa harus tetap disesuaikan dengan kondisi guna menjadikan bahasa Indonesia tetap layak



sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sehingga fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek tetap optimal.

Gunarwan (2003, hlm. 12) mengatakan hidup atau matinya bahasa bergantung kepada para penuturnya; keputusan membiarkan bahasa bergeser atau bertahan itu semata-mata bergantung kepada sikap masyarakat bahasa itu sendiri. Tambahan pula, Ghani (2013, hlm. 8) mengatakan bahwa, selain penguatan bahasa melalui pembangunan korpus bahasa, usaha yang juga perlu dilakukan untuk memperkasakan unsur yang paling penting dalam ekologi kerelevanan dan kelestarian suatu bahasa itu adalah penggunaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ghani (2013, hlm. 3) juga mengatakan bahasa itu harus direvolusikan, bukannya dibiarkan berevolusi sendiri-sendiri sesuai dengan penggunaannya karena ilmu berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang sains, teknologi, *kejuruteraan*, dan matematika. Usaha tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas kedudukan bahasa Indonesia yang tertuang secara eksplisit dalam Bab XV Pasal 36 UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2009, dan terkait fungsi bahasa Indonesia yang dirumuskan dalam Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25—28 Februari 1975 dan telah diperbaharui dengan rumusan Seminar Politik Bahasa di Bogor tanggal 8—12 November 1999. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan bahasa yang melibatkan pengguna untuk melakukan kontak langsung dengan bahasa.

Implementasi dari kebijakan tersebut sangat diperlukan agar kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang telah ditetapkan tersebut dapat berjalan secara maksimal (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1976b). Implementasi dari keputusan tersebut dapat berupa upaya merealisasikan politik bahasa dalam berbagai bidang.

Pendidikan merupakan bidang yang dinilai tepat karena pengaturan penggunaan bahasa Indonesia secara jelas ditetapkan sebagai alat pengantar dalam pembelajaran sehingga dikenal sebagai alat pendidikan nasional. Selain sebagai alat pendidikan nasional, pengajaran bahasa Indonesia juga sebagai pembinaan bahasa Indonesia (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1976b, hlm. 47). Upaya tersebut dikenal sebagai politik bahasa.

Politik bahasa dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan memperkuat peran bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Penguatan peran dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan mengenalkan bahasa Indonesia melalui pembelajaran literasi. Selain sebagai wadah menyalurkan politik bahasa, literasi dipilih sekaligus memberikan solusi permasalahan literasi di dunia pendidikan. Survei yang dilakukan UNESCO menempatkan kemampuan literasi siswa Indonesia di peringkat 60 dari 61 negara (Nadya, 2017, hlm. 1). Literasi dipilih sebagai upaya politik bahasa juga dinilai tepat karena tujuan utama pendidikan adalah perolehan keterampilan keaksaraan oleh para pembelajar yang akan memungkinkan mereka untuk mengakses dan menggunakan informasi, mengembangkan keterampilan intelektual, mengekspresikan diri mereka melalui media bahasa dan akhirnya lebih memahami diri mereka sendiri dan lingkungan sosial dan budaya mereka (Papapavlou & Pavlou, 2005, hlm. 164). Selain itu, kurikulum Indonesia bersifat pragmatis atau komunikatif yang dinyatakan dalam silabus standar; buku-buku pelajaran membaca diberi bobot lebih besar daripada keterampilan produktif (Nababan, 2014).



Literasi merupakan kemampuan individu mengolah dan memahami informasi saat membaca atau menulis sehingga sangat tepat menjadi sarana memperkaya pembendaharaan kata, menambah wawasan terkait bahasa, dan mengembangkan kreativitas kemampuan bahasa produktif sebagai upaya membina dan melestarikan bahasa Indonesia. Upaya tersebut selayaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa saat ini.

Sebagaimana dikemukakan Kirchoff (2017, hlm. 117), siswa saat ini hidup di dunia yang makin digital sehingga penguasaan alat dan keterampilan digital bukan semata-mata kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan. Hasil riset oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama dengan Pusat Kajian Komunikasi (Pusakom) menunjukkan jumlah pengguna internet telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 10,56 juta jiwa dari hasil survei pada tahun 2016 (Kominfo, 2018, hlm. 1). Riset lainnya dilakukan oleh Son (2017, hlm. 95) dengan hasil dari dua penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa semua peserta paham teknologi digital dan tertarik menggunakan perangkat seluler seperti kamus elektronik, ponsel pintar, komputer tablet, dan laptop. Beers dkk. (2010, hlm. 4) menyatakan saat ini banyak anak-anak lebih banyak membaca secara *online* daripada *offline*. Mereka tumbuh di dunia digital yang mengakibatkan mereka relatif sedikit membaca dan menulis melibatkan kertas karena sebagian besar membaca dan menulis dengan alat digital (baik formal maupun nonformal).

Besarnya kuantitas pengguna internet dan daya tarik siswa terhadap bidang teknologi memperkuat usaha memadukan literasi dengan teknologi sehingga dapat menjadi alternatif yang tepat untuk menjalankan politik bahasa. Perpaduan kedua bidang tersebut dikenal dengan nama literasi digital. Literasi digital perlu didorong sebagai mekanisme pembelajaran, yang terstruktur dalam kurikulum, atau setidaknya terkoneksi dengan sistem belajar mengajar. Literasi digital menjadi wadah mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi, maraknya pengguna internet, serta rendahnya literasi siswa di Indonesia. Selain itu, pemilihan siswa menengah sebagai sasaran literasi digital ini didasari oleh hasil survei pengguna internet tahun 2017 terbesar berdasarkan usia, yakni rentang usia 13—18 tahun sebesar 75,50%. (Kominfo, 2018, hlm. 1).

Literasi saat ini sedang marak disosialisasikan dan diterapkan sehingga memunculkan Gerakan Literasi Nasional. Usaha lainnya dengan memberlakukan peraturan mengenai gerakan literasi di awal pembelajaran dapat menjadi peluang literasi digital. Keberhasilan membangun literasi digital merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud, 2017, hlm. 5).

Literasi digital merupakan inovasi teknologi dengan mengubah proses pengambilan informasi dan diseminasi dari analog ke digital melalui teks digital. Kumpulan teks digital yang membentuk bahan ajar itulah yang disebut sebagai kurasi digital. Kurasi digital dibuat dengan tujuan mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia melalui usaha pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, kualitas bahan bacaan sangatlah penting. Akan tetapi, kelengkapan bahan bacaan saat ini belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kelengkapan bahan bacaan tanpa mengesampingkan aspek konten, bahasa, dan tingkat kemampuan kognitif



pembaca merupakan hal yang penting guna memfasilitasi literasi siswa. Peluang tersebut dapat diisi dengan menciptakan bahan ajar nonformal yang telah distandardisasi dalam bentuk kurasi digital tanpa mengesampingkan tujuan pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia melalui literasi berbasis aplikasi digital sebagai upaya politik bahasa di sekolah menengah.

## LANDASAN TEORI

### Literasi Digital

Menurut UNESCO (dalam Kemendikbud 2017, hlm. 8), konsep literasi digital menaungi dan menjadi landasan penting kemampuan memahami perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Literasi menurut Tomskin (dalam Resmini, 2008, hlm.7) adalah kemampuan membaca dan menulis dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karenanya, konsep literasi digital merupakan perpaduan antara kegiatan literasi yang melibatkan alat digital. Literasi digital merupakan inovasi teknologi mengubah proses pengambilan informasi dan diseminasi dari analog ke digital melalui teks digital.

Terkait hal tersebut Selber (2004, hlm. 25) berpendapat bahwa ada tiga posisi subjek yang terhubung ke bagian literasi digital, meliputi 1) siswa sebagai pengguna teknologi; 2) siswa sebagai penanya teknologi; dan 3) siswa sebagai produsen teknologi. Dengan demikian, dalam literasi siswa memiliki posisi fungsional, kritis, dan keaksaraan retorik.

Literasi fungsional adalah kemampuan melakukan pekerjaan yang efektif dengan menggunakan teknologi tertentu. Berbeda dengan fokus utama literasi fungsional, literasi kritis adalah kemampuan untuk mengenali, mengkritik, dan bereaksi terhadap bahan bacaan, sedangkan literasi retorik berkaitan dengan pemberdayaan penulis. Sejalan dengan hal tersebut, Kemendikbud (2017, hlm. 8) mengungkapkan bahwa literasi digital merupakan kecakapan (*life skills*) yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital.

Belshaw (2011, hlm. 206) mengatakan bahwa ada delapan elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital:

- 1) kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital;
- 2) kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten;
- 3) konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual;
- 4) komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital;
- 5) kepercayaan diri yang bertanggung jawab;
- 6) kreatif, yaitu melakukan hal baru dengan cara baru;
- 7) kritis dalam menyikapi konten; dan
- 8) bertanggung jawab secara sosial.

Kemendikbud (2017, hlm. 7) telah menetapkan indikator literasi digital di sekolah. *Pertama*, basis kelas berkaitan dengan jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan; intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran; dan tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam



menggunakan media digital dan internet. *Kedua*, basis budaya sekolah berkaitan dengan (a) jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital; (b) frekuensi peminjaman buku bertema digital; (c) jumlah kegiatan di sekolah yang memanfaatkan teknologi dan informasi; (d) jumlah penyajian informasi sekolah dengan menggunakan media digital atau situs laman; (e) jumlah kebijakan sekolah tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan sekolah; dan (f) tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal layanan sekolah (misalnya, rapor elektronik, pengelolaan keuangan, dapodik, pemanfaatan data siswa, dan profil sekolah). *Ketiga*, basis masyarakat meliputi: jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi digital di sekolah dan tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, dan lembaga dalam pengembangan literasi digital.

Gerakan literasi digital di sekolah harus dikembangkan sebagai mekanisme pembelajaran yang terkoneksi dengan sistem belajar mengajar. Pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas siswa maupun guru perlu ditingkatkan dalam proses pengajaran literasi digital. Selain itu, pihak sekolah perlu memfasilitasi guru untuk mengembangkan budaya literasi digital.

Kemendikbud (2017, hlm. 9) merumuskan prinsip dasar pengembangan literasi digital sebagai berikut.

#### 1. Pemahaman

Prinsip pertama literasi digital adalah pemahaman sederhana yang berupa kemampuan mengekstrak ide secara implisit maupun ekspilisit dari media.

#### 2. Saling Ketergantungan

Saling ketergantungan yang dimaksud dalam literasi digital adalah suatu bentuk media yang dapat berhubungan dengan yang lain secara potensial, metaforis, ideal, dan harfiah guna mencapai tujuan literasi.

#### 3. Faktor Sosial

Faktor sosial tidak hanya berupa distribusi informasi, tetapi juga memperhatikan siklus distribusi informasi yang meliputi: siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi diberikan. Pemerhatian faktor sosial dimaksudkan tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri, tetapi juga dapat membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri.

#### 4. Kurasi

Kurasi berkaitan dengan penyimpanan informasi agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Kurasi tingkat lanjut harus berpotensi sebagai kurasi sosial, seperti bekerja sama untuk menemukan, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang bernilai. Menurut Mills (2013, hlm. 47), kurasi digital adalah pengayakan dan agregasi dari internet dan sumber daya lainnya menjadi koleksi agar dapat diakses oleh guru dan siswa secara mudah, relevan, personal dan dinamis. Dalam lingkungan digital, elemen tambahan dapat dimanfaatkan, seperti memasukkan media sosial untuk menyebarkan konten, kemampuan pengguna lain untuk menyarankan konten atau meninggalkan komentar dan evaluasi kritis dan pemilihan konten agregasi (Ungerer, 2016).

Sebagaimana prinsip literasi digital yang dikemukakan di atas, diperlukan sebuah inovasi berbentuk kurasi dalam menyimpan bahan bacaan agar mempermudah siswa untuk memperoleh tujuan literasi. Inovasi tersebut harus



mampu memfasilitasi keempat prinsip yang dikemukakan di atas. Dengan inovasi tersebut siswa tidak hanya mampu menyerap ide, tetapi juga mampu menghubungkan informasi yang diperoleh dengan ide yang dimiliki agar dapat membentuk kerangka pemikiran yang tidak hanya dapat menyimpan informasi, tetapi juga membagikan informasi.

### **Politik Bahasa**

Politik bahasa nasional adalah kebijakan nasional yang berisi pengarah, perencanaan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Keseluruhan masalah itu merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa dan sastra Indonesia, (2) masalah bahasa dan sastra daerah, dan (3) masalah bahasa asing di Indonesia.

Pengelolaan keseluruhan masalah bahasa itu memerlukan adanya suatu kebijakan nasional yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pengelolaan masalah bahasa-bahasa itu benar-benar berencana, terarah, dan menyeluruh (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011, hlm. 3). Kebijakan bahasa sebagai praktik manusia muncul dari karakteristik paling mendasar kondisi linguistik manusia: ketegangan yang tak terhindarkan antara keberagaman linguistik di satu sisi dan saling ketergantungan antarmasyarakat (Peled, 2014, hlm. 301). Ricento (dalam Peled, 2014, hlm. 301) mengatakan tidak ada teori menyeluruh tentang kebijakan dan perencanaan bahasa, sebagian besar karena kompleksitas masalah yang melibatkan bahasa dalam masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan bahasa harus dilakukan dengan berhati-hati.

Masuknya unsur-unsur bahasa asing di tengah derasnya arus globalisasi tidak dapat dipungkiri berdampak pada ketidakstabilan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Meskipun demikian, bahasa Indonesia harus mempertahankan eksistensinya sebagai bahasa modern dengan tidak menutup diri dari masuknya unsur asing yang diperlukan sehingga dapat dilakukan penyerapan unsur asing melalui penyerasian dengan sistem bahasa Indonesia tanpa mengesampingkan identitas bahasa Indonesia. Kedua hal tersebut membutuhkan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia dalam suatu pemikiran yang dinamakan politik bahasa.

Indonesia telah lama memiliki politik bahasa. Politik bahasa pertama dihasilkan melalui perumusan Sumpah Pemuda 1928 yang berisi pengakuan bahwasanya bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Adanya hal tersebut merupakan langkah pertama dalam perumusan garis kebijakan mengenai bahasa Indonesia. Garis kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, yang menyatakan bahwa "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia", yang memberikan dasar kuat dan resmi bagi pemakaian bahasa Indonesia, bukan hanya sebagai bahasa perhubungan pada tingkat nasional, melainkan juga sebagai bahasa resmi kenegaraan. Tambahan pula, politik bahasa juga terkandung dalam moto Kurikulum 2013 yang berbunyi "Bahasa Indonesia Penghela dan Pembawa Pengetahuan". Moto demikian menyiratkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi media utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan.

Fungsi politik bahasa nasional sebagaimana diungkap oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1976b) adalah memberikan dasar dan pengarah





bagi perencanaan serta pengembangan bahasa nasional. Hal tersebut dapat memperjelas fungsi dan kedudukan bahasa (nasional) dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Dengan demikian, mengutamakan bahasa Indonesia di negeri ini adalah hal yang semestinya dilakukan.

Arus globalisasi saat ini menuntut perencanaan terkait upaya menjadikan bahasa Indonesia tetap eksis di tengah maraknya tuntutan penguasaan bahasa asing. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia. Pengembangan bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerdayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pembinaan bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia, sedangkan perlindungan bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011, hlm. 9).

Kebijakan bahasa nasional dahulu didasarkan pada hasil Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1975. Namun, seiring dengan tuntutan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi dalam hubungan antarbangsa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2011, hlm. 5) merumuskan kembali kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing sebagai berikut.

#### a. Bahasa Indonesia

Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya serta antardaerah. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36: Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, (4) bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, (5) sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, (6) bahasa media massa, (7) pendukung sastra Indonesia, dan (8) pemer kaya bahasa dan sastra daerah.

#### b. Bahasa Daerah

Kedudukan bahasa daerah dirumuskan atas kenyataan bahwa bahasa daerah digunakan sebagai sarana perhubungan dan pendukung kebudayaan di daerah atau di dalam masyarakat etnik tertentu di Indonesia. Oleh karena itu, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (4) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, serta (5) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Dalam hubungannya dengan fungsi bahasa



Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa Indonesia, (2) bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan/atau pelajaran lain, dan (3) sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Dalam keadaan tertentu, bahasa daerah dapat juga berfungsi sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah.

#### c. Bahasa Asing

Bahasa yang tersebar selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah berkedudukan sebagai bahasa asing. Bahasa asing, baik yang digunakan dan diajarkan maupun yang digunakan tanpa diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan tingkat tertentu, tidak bersaing dengan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Bahasa asing juga tidak bersaing dengan bahasa-bahasa daerah, baik sebagai lambang nilai sosial budaya maupun sebagai alat perhubungan masyarakat daerah. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa asing di Indonesia, bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa rumpun Melayu berfungsi sebagai (1) alat perhubungan antarbangsa dan (2) sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Bahasa-bahasa asing tertentu di Indonesia juga dapat memiliki fungsi lain, misalnya sebagai sumber pengembangan bahasa Indonesia, terutama dalam kaitan dengan pengembangan tata istilah keilmuan dan sebagai bahasa keagamaan dan budaya Islam sebagaimana pada bahasa Arab. Apabila diperlukan, bahasa-bahasa asing lain juga dapat berfungsi sebagai sumber pemerayaan kosakata.

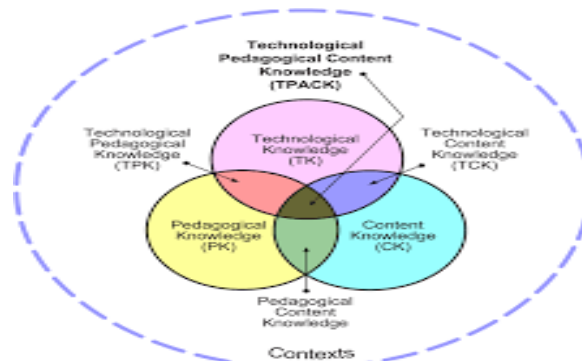
Perumusan kedudukan beserta fungsi ketiga bahasa yang berkembang di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan kejelasan batas penggunaan bahasa tersebut. Dengan adanya kejelasan batasan penggunaan ketiga bahasa tersebut, moto kebijakan terkait ketiganya, yaitu “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah dan Kuasai Bahasa Asing” dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

### **Literasi Berbasis Aplikasi Digital sebagai Upaya Politik Bahasa Indonesia di Tingkat Menengah**

Literasi Berbasis Aplikasi Digital (LBAD) sebagai upaya politik bahasa Indonesia di tingkat menengah merupakan upaya pembinaan bahasa Indonesia di bidang pengajaran. Pemertahanan eksistensi bahasa Indonesia disesuaikan dengan tuntutan penguasaan alat digital dalam dunia pendidikan. Gencarnya kegiatan literasi yang dilakukan pemerintah merupakan sarana yang dinilai tepat untuk menyalurkan eksistensi bahasa Indonesia. Selain sebagai bentuk pemertahanan eksistensi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di bidang pendidikan, LBAD juga diharapkan mampu menjadi solusi atas rendahnya tingkat literasi siswa melalui literasi digital. Dengan meningkatkan keterampilan literasi digital, mereka akan menjadi pemelajar yang efektif dan mandiri yang dapat mengambil keuntungan dari alat dan sumber daya untuk pembelajaran bahasa dalam konteks autentik (Son, 2017).

LBAD berbentuk kurasi digital digunakan untuk memudahkan siswa mengakses materi bacaan yang terangkum dalam sebuah fitur aplikasi yang lengkap. Wolff dan Mulholland (2013) menyarankan untuk terlibat dalam belajar melalui kurasi karena dapat meningkatkan pemahaman tentang fungsi tertentu yang mendukung fitur belajar yang signifikan.

Prinsip yang dapat diterapkan dalam LBAD ialah konsep *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK). TPACK merupakan integrasi teknologi dengan bidang pembelajaran. Koehler & Mishra (2006, hlm. 3) menyatakan bahwa dalam kerangka kerja TPACK, tiga basis meliputi: pengetahuan yang luas-teknologi, pedagogi, dan konten. Ketiga hal tersebut menyebabkan representasi konsep-konsep baru dan membutuhkan pengembangan kepekaan terhadap hubungan dinamis, transaksional antara ketiga komponen sehingga menghasilkan pengajaran yang baik dengan teknologi yang dapat dilihat melalui gambar berikut.



Sumber: Mishra & Koehler (2006, hlm. 3)

*Technological Knowledge* (TK) mencakup pemahaman tentang bagaimana menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer, alat presentasi seperti penyaji dan proyek dokumen, dan teknologi lain yang digunakan dalam konteks pendidikan. Hal yang utama dalam TK ialah kemampuan beradaptasi dan belajar teknologi baru. Ungerer (2016) menegaskan bahwa siswa harus diajarkan keterampilan untuk mengakses informasi yang relevan dan menyaringnya untuk tujuan dan audiens yang spesifik. Terkait hal itu, pengembangan literasi digital dalam pendidikan bahasa memerlukan panduan praktis dan peluang untuk mempelajari alat digital dan sumber daya yang tersedia dan bagaimana menemukan dan menggunakannya untuk pembelajaran bahasa.

*Content Knowledge* (CK) mengacu pada pengetahuan atau sifat spesifik dari suatu disiplin atau materi pelajaran. CK sangat bervariasi antara konteks pendidikan yang berbeda (misalnya perbedaan antara konten bahasa Indonesia sekolah dasar dan bahasa Indonesia pascasarjana), dan guru diharapkan untuk menguasai konten yang mereka ajarkan. Pengetahuan konten juga penting karena menentukan pola pikir khusus disiplin untuk setiap bidang.

*Pedagogical Knowledge* (PK) menggambarkan pengetahuan "tujuan umum". Ini adalah seperangkat keterampilan yang harus dikembangkan guru untuk mengelola dan mengatur kegiatan belajar mengajar untuk hasil pembelajaran yang diharapkan. Pengetahuan ini tidak terbatas melibatkan pemahaman mengenai kegiatan manajemen kelas, peran motivasi siswa, perencanaan pelajaran, dan penilaian pembelajaran, tetapi juga mendeskripsikan pengetahuan tentang metode pengajaran yang berbeda, seperti mengetahui bagaimana mengatur kegiatan dengan cara yang kondusif untuk membangun pengetahuan yang membangun siswa.



*Pedagogical Content Knowledge* (PCK) memiliki konsep bahwa konten yang berbeda membutuhkan metode pengajaran yang berbeda agar menghasilkan pengajaran yang efektif.

*Technological Content Knowledge* (TCK) berkaitan dengan pengetahuan hubungan timbal balik antara teknologi dan konten. Teknologi memengaruhi apa yang kita ketahui dan memperkenalkan.

*Technological Pedagogical Knowledge* (TPK) mengidentifikasi hubungan timbal balik antara teknologi dan pedagogi. Pengetahuan ini memungkinkan untuk memahami apa yang dapat dilakukan teknologi untuk tujuan pedagogis tertentu. Bagi para guru, mereka dapat memilih alat yang paling tepat berdasarkan kesesuaiannya untuk pendekatan pedagogis khusus.

*Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) menggambarkan pengetahuan yang disintesis dari masing-masing badan pengetahuan yang dijelaskan dengan fokus pada bagaimana teknologi dapat dibuat secara unik untuk memenuhi kebutuhan pedagogis untuk mengajarkan konten tertentu dalam konteks tertentu. Badan pengetahuan yang terdiri atas TPACK mewakili aspek penting dari pengajaran. TPACK memberikan pengetahuan mengenai teknologi, pedagogi, dan konten yang disintesis dan digunakan sebagai desain pengalaman belajar bagi siswa.

Penerapan LBAD melalui pembelajaran *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk mampu mengolah, menganalisis, dan memahami informasi dari bahan bacaan yang terangkum dalam kurasi digital. Selain itu, Schacter mengatakan bahwa keefektifan teknologi pendidikan dipengaruhi oleh karakteristik siswa, desain perangkat lunak, peran pendidik, dan akses yang dimiliki oleh siswa terhadap teknologi. Untuk itu, digunakan TPACK dalam LBAD (*Technological Pedagogical Content Knowledge Exploring, Developing, and Assessing*) (2015, hlm. 6). Kegiatan literasi diharapkan dapat memasyarakatkan bahasa, meningkatkan mutu penggunaan bahasa serta wawasan terkait bahasa sehingga usaha membina, melestarikan bahasa dapat tercapai sebagai tujuan utama politik bahasa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mendeskripsikan konsep upaya politik bahasa melalui literasi digital dengan menciptakan wadah berbentuk kurasi berbasis aplikasi digital. Oleh karenanya, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka berupa hasil penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Zed (2004, hlm. 3) mengungkapkan bahwa penelitian atau studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca atau mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Oleh karena itu, penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan hasil kajian pustaka.

## **PEMBAHASAN**

LBAD merupakan literasi yang menggunakan bahan bacaan yang sudah tersedia dan terstandarisasi yang terhimpun dalam sebuah aplikasi digital guna memudahkan dan memfasilitasi kegiatan literasi di sekolah tanpa



mengesampingkan usaha pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia. Terkait hal tersebut, Urgerer (2016, hlm. 1) mengatakan guru membutuhkan wawasan yang cukup dalam menggabungkan berbagai alat kurasi digital informal dalam praktik pendidikan. Pengajar keaksaraan bertanggung jawab mengintegrasikan literasi baru ke dalam kurikulum untuk mempersiapkan siswa agar sukses berpartisipasi dalam lingkungan global (International Reading Association, 2009, hlm. 1).

Konsep literasi digital sebagaimana dikemukakan oleh Kemendikbud (2017, hlm. 8) adalah kecakapan (*life skills*) yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Oleh karena itu, penyediaan bahan bacaan yang bersifat nonilmiah saja dalam gerakan literasi sebelum pembelajaran tidaklah cukup. Selain itu, terdapat pertimbangan adanya siswa yang kurang menyenangi bacaan ilmiah. Untuk itu, penulis menawarkan konsep literasi yang terangkum dalam sebuah aplikasi digital berbentuk kurasi digital.

Bahan bacaan yang ditawarkan mulai dari teks ilmiah, semiilmiah, dan nonilmiah. Bahan bacaan tersebut tidak hanya digunakan saat literasi di awal pembelajaran. Kelengkapan bahan bacaan yang ditawarkan tidak hanya mendukung literasi prapembelajaran, tetapi juga dapat mendukung proses pembelajaran kelas tradisional untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran yang sesuai dengan ketersediaan kurasi tersebut. Selain sisi kelengkapan, bahan bacaan tersebut harus melalui proses kelayakan dan kesesuaian dengan tingkat pembaca. Dalam hal ini bahan bacaan tersebut hanya terdiri atas dua tingkatan, yakni tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau sederajat.

Adapun materi yang dapat dimasukkan dalam literasi berbasis aplikasi digital tersebut terbagi menjadi dua materi, yakni materi umum dan materi khusus yang diuraikan sebagai berikut.

#### a. Materi Umum

Materi umum merupakan kumpulan bahan bacaan yang dihadirkan untuk membekali siswa dengan pengetahuan terkait bahasa Indonesia. Materi umum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah materi yang berisikan bacaan terkait sejarah bahasa Indonesia atau hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Materi umum tersebut dapat diakses oleh siswa tingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas.

- 1) Sejarah Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Pedoman Tata Bahasa Baku
- 4) PUEBI

#### b. Materi Khusus

Materi khusus merupakan kumpulan bahan bacaan yang dihadirkan untuk memfasilitasi literasi siswa. Berbeda dengan materi umum, materi ini hanya dapat diakses sesuai dengan jenjang pendidikan.

- 1) Bacaan Ilmiah
- 2) Bacaan Semiilmiah
- 3) Bacaan Nonilmiah



Dengan membuat aplikasi berbasis digital yang membentuk kurasi kita dapat mawadahi bahan bacaan yang nonilmiah, semiilmiah, dan bahkan ilmiah yang dapat menunjang proses pembelajaran. Kurasi tersebut juga dapat mawadahi siswa yang senang membaca teks ilmiah.

Implementasi LBAD di tingkat menengah disesuaikan dengan mencakup tiga basis sebagaimana dikemukakan oleh Mishra & Koehler (2006, hlm. 3), yaitu meliputi pengetahuan yang luas-teknologi, pedagogi, dan konten. Ketiganya harus menyebabkan representasi konsep-konsep baru dan membutuhkan pengembangan kepekaan terhadap hubungan dinamis dan transaksional antara ketiga komponen sehingga menghasilkan pengajaran yang baik dengan teknologi. Keterkaitan ketiga basis tersebut dalam LBAD adalah sebagai berikut.

*Technological Knowledge (TK)* mencakup pemahaman tentang bagaimana menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer, alat presentasi seperti penyaji dan proyek dokumen, dan teknologi lain yang digunakan dalam konteks pendidikan sehingga memfasilitasi kemampuan untuk beradaptasi dan belajar teknologi baru.

*Content Knowledge (CK)* mengacu pada pengetahuan atau sifat spesifik dari suatu disiplin atau materi pelajaran. Terkait dengan sifat spesifik dari literasi, guru diharapkan menguasai konten yang mereka ajarkan.

*Pedagogical Knowledge (PK)* menggambarkan pengetahuan tentang “tujuan umum” dalam kegiatan literasi. Guru harus dikembangkan untuk mengelola dan mengatur kegiatan literasi hasil pembelajaran yang diharapkan. Pengaturan tersebut meliputi: kegiatan manajemen kelas, peran motivasi siswa, perencanaan pelajaran, dan penilaian literasi. PK juga dapat mengondisikan kegiatan dengan cara yang kondusif untuk membangun pengetahuan siswa.

*Pedagogical Content Knowledge (PCK)* melibatkan siswa dalam tugas komunikatif yang bermakna dan autentik. Dalam hal ini guru memberikan tugas terkait aplikasi kemampuan berbahasa yang produktif, tetapi dengan kuantitas yang sedikit dibandingkan dengan literasi yang dilakukan, misalnya, menulis karya berdasarkan literasi yang dilakukan selama satu bulan terakhir. Dalam penulisan karya, siswa diberi kebebasan untuk menulis karya berupa karya ilmiah, semiilmiah, atau bahkan ilmiah.

*Technological Content Knowledge (TCK)* menjelaskan pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara teknologi dan konten. Teknologi memengaruhi apa yang kita ketahui dan memperkenalkan kemampuan baru tentang bagaimana kita merepresentasikan konten tertentu dengan cara-cara baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Misalnya, setelah membaca teks pantun, siswa mengetahui ciri pantun dan bisa membuat pantun.

*Technological Pedagogical Knowledge (TPK)* mengidentifikasi hubungan timbal balik antara teknologi dan pedagogi. Dalam hal ini guru dapat menjelaskan kepada siswa bahwa setelah mendapatkan pengetahuan dari proses literasi mereka dapat mengajarkannya kepada orang lain.

*Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)* merupakan pengetahuan yang disintesis dan dapat diajarkan kepada orang lain sebagai desain pengalaman belajar bagi siswa dengan menyalurkan kreativitasnya melalui tulisan terkait literasi yang dilakukan.

Adapun sintaks penerapan LBAD dengan konsep TPACK di kelas tradisional dimulai dari pengajar. *Pertama*, pengajar melakukan pratinjau dan berdiskusi



dengan pimpinan terkait aplikasi yang tersedia yang akan mendukung sasaran literasi dan pendekatan pedagogis (misalnya, pembacaan independen, kelompok kecil, instruksi seluruh kelas) untuk menemukan kelayakannya. *Kedua*, pengajar merancang kegiatan literasi kelas di bidang pemahaman, kelancaran, kosakata, dan sebagainya yang akan memanfaatkan fitur dengan menimbang konten literasi yang akan diajarkan dan pendekatan pedagogis yang akan digunakan. *Ketiga*, pengajar mengembangkan kegiatan instruksional yang memungkinkan siswa untuk mendesain tanggapan terhadap teks yang menunjukkan pemahaman dan mengembangkan keterampilan literasi digital. *Keempat*, pengajar memberikan waktu kepada siswa untuk menjelajah dan bereksperimen dengan alat sambil menunjukkan kepada mereka fitur-fitur utama (misalnya, menggunakan kamus). Dalam hal ini, guru dapat menjelaskan kepada siswa bahwasanya setelah mendapatkan pengetahuan dari proses literasi mereka dapat mengajarkannya kepada orang lain. *Kelima*, pengajar memperkenalkan bahan bacaan baru dan mengelola hasil literasi siswa dengan memberikan mereka peluang untuk menyalurkan kreativitasnya melalui tulisan terkait literasi yang dilakukan.

Konsep literasi digital menaungi dan menjadi landasan penting dalam memahami perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi yang direalisasikan melalui kegiatan membaca dan menulis teks digital. LBAD melibatkan siswa fungsional yang mampu menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, mampu mengenali, mengkritik, dan memberikan respons atas bahan bacaan, dan mampu menghasilkan produk berdasarkan kegiatan literasi yang dilakukan. Dalam konteks ini siswa mampu menulis berbagai jenis karya baik ilmiah, semiilmiah, maupun nonilmiah setelah pembimbingan yang dilakukan melalui konsep pembelajaran TPACK.

Akhir dari kegiatan literasi yang dilakukan adalah siswa dibekali kecakapan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, dan juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Selain itu, seringnya kontak dengan bahasa Indonesia dapat meningkatkan perbendaharaan kata, kemampuan berbahasa produktif, serta wawasan terkait bahasa Indonesia. Adanya dampak yang ditimbulkan tersebut merupakan indikasi keberhasilan pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia yang menjadi fungsi dari politik bahasa.

## **PENUTUP**

LBAD merupakan upaya dalam hal pembinaan dan pemeliharaan bahasa. Pembinaan dan pemeliharaan bahasa merupakan upaya politik bahasa. Politik bahasa dalam pendidikan dapat dilakukan dengan menciptakan bahan ajar nonformal yang telah distandardisasi sehingga siswa tidak hanya memperoleh kecakapan yang melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sesuai dengan konsep TPACK. Dampak yang dipaparkan merupakan upaya memodernkan bahasa, meningkatkan mutu penggunaan bahasa, dan menjaga kelestarian bahasa melalui bidang pengajaran melalui literasi digital yang secara tidak langsung telah mewujudkan upaya pembinaan dan pemeliharaan bahasa Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2011). *Politik Bahasa: Rumusan Seminar Politik Bahasa*. Hasan Alwi dan Dendy Sugono. (Ed.). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Belshaw, Douglas A. J. (2011). *What is "Digital Literacy"* (Master's Thesis). Diakses dari <http://dougbeshaw.com//thesis>.
- Beers, Kylene. dkk. (2010). *Standards for the Assessment of Reading and Writing*. International Reading Association and the National Council of Teachers of English. doi://www.google.com/url.
- Buletin Pos dan Telekomunikasi. (2016). 14(2): 79—94.
- C. Angeli & N. Valanides. (Ed.). (2015). *Technological Pedagogical Content Knowledge Exploring, Developing, and Assessing TPACK*. New York, NY: Springer. doi:10.1007/978-1-4899-8080-9.
- Ghani, Rusli Abdul. (2013). "Penguatan Bahasa melalui Pemeraksanaan Bangsa Berilmu". Dalam *Kongres Internasional XI Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Gunarwan, Asim. (2003). "Pembalikan Pergeseran Bahasa Daerah untuk Memperkokuh Budaya Bangsa". *Kongres Bahasa Indonesia VIII*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- International Reading Association. (2009). *New Literacies and 21st-century Technologies: A Position Statement of the International Reading Association*. Newark, DE: Author.
- Jose, K. (2016). "Digital Literacy Matters: Increasing Workforce Productivity through Blended English Language Programs". *Higher Learning Research Communications*, 6(4): 1—17. Diakses dari <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1132743.pdf>.
- Kemendikbud. (2017). *Materi pendukung literasi digital*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2018). "Jumlah Pengguna Internet 2017 Meningkat, Kominfo Terus Lakukan Percepatan Pembangunan Broadband". Siaran Pers No. 53. Diakses dari [https://kominfo.go.id/content/detail/12640/siaran-pers-no-53hmkominfo022018-tentang-jumlah-pengguna-internet-2017meningkat--kominfo-terus-lakukan-percepatan-pembangunan-broadband/0/siaran\\_pers/kominfo/02/2018](https://kominfo.go.id/content/detail/12640/siaran-pers-no-53hmkominfo022018-tentang-jumlah-pengguna-internet-2017meningkat--kominfo-terus-lakukan-percepatan-pembangunan-broadband/0/siaran_pers/kominfo/02/2018).
- Mills, M.S. (2013). "Facilitating Multimodal Literacy Instruction Through Digital Curation". *Technological Tools for the Literacy Classroom*. Whittingham, S. Huffman, W. Rickman, & C Wiedmaier Hershey (Ed.), 46–63, Hershey, PA: Idea Group Inc (IGI).
- Mishra & Koehler. (2013). "The Technological Pedagogical Content Knowledge Framework for Teachers and Teacher Educators". *ICT Integrated Teacher Education: A Resource Book*, 2—3. Diakses dari [http://cemca.org.in/ckfinder/userfiles/files/ICT%20teacher%20education%20Module%201%20Final\\_May%2020.pdf](http://cemca.org.in/ckfinder/userfiles/files/ICT%20teacher%20education%20Module%201%20Final_May%2020.pdf).
- Nababan, P.W.J. (2014). "Language in Education: The Case of Indonesia". *Language Policy and Education*, 37(1): 115—131. Diakses dari <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>.





- Nadya, Irwandari. (2017). *Mengapa Literasi di Indonesia Terendah*. [Internet]. Diakses dari <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170910122629-445-240706/mengapa-literasi-di-indonesia-sangat-terendah/> pada tanggal 15 April 2018.
- Papapavlou, A. and Pavlou, P. (2005). "Literacy and Language-in-Education Policy in Bidialectal Settings". *Current issues in language planning*. 6(2): 164—181, doi:10.1080/14664200508668279.
- Peled, Yael. (2014). "Normative Language Policy: Interface and Interferences". *Language Policy*. 13(4): 301—315 doi:10.1007/s10993-014-9325-z.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1976a). *Politik Bahasa Nasional 1*. Amran Halim (Ed.). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1976b). *Politik Bahasa Nasional 2*. Amran Halim (Ed.). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Selber, S. (2004). Multiliteracies for a Digital Age. *IEEE Transactions on Professional Communication*, 48(4): Diakses dari <https://booksc.org/book/3475635/45dae1>.
- Son, J.B., Park, S.S., Park, M. (2017). "Digital Literacy of Language Learners in Two Different Contexts". *Jaltcall Journal* 13(2): 77—96.
- Sumadyo, Bambang. (2010). *Bahasaku "Indglishnesia" Sebuah Kajian Penggunaan Kata Bahasa Asing dalam Bahasa Indonesia*. 2 (3):170—177.
- Ungerer, L.M. (2016). "Digital Curation as a Core Competency in Current Learning and Literacy: A Higher Education Perspective". *International Review of Research in Open and Distributed Learning*. 17(5):1—5. doi:<https://eric.ed.gov/?q=teaching+materials+of+digital+&id=EJ1117357>
- Wolff, A. & Mulholland, P. (2013). "Curation, Curation, Curation". *Proceedings of the 3rd Narrative and Hypertext Workshop*. 1—5. Diakses dari <http://nht.ecs.soton.ac.uk/2013/papers/1-awolff.pdf>.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



**CATATAN**  
**KONGRES BAHASA INDONESIA XI**  
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2018

**Sesi 2 Kelompok 9**

Pembicara	: Nurhaidah dan Muhamad Zainal Arifin
Judul Makalah	: “Literasi Berbasis Aplikasi Digital sebagai Upaya Politik Bahasa di Sekolah Menengah”
Hari, Tanggal	: Senin, 29 Oktober 2018
Pukul	: 19.30—21.00
Moderator	: Drs. Mustakim, M.Hum.
Pencatat	: 1. Triwulandari 2. Winci Firdaus

**Rangkuman Penyajian Makalah**

1. Kebijakan bahasa harus tetap disesuaikan dengan kondisi guna menjadikan bahasa Indonesia tetap layak sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sehingga fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek tetap optimal.
2. Bahasa itu harus direvolusikan, bukannya dibiarkan berevolusi sendiri-sendiri sesuai dengan penggunaannya karena ilmu berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang sains, teknologi, *kejuruteraan*, dan matematika.
3. Politik bahasa dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan memperkuat peran bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Penguatan peran dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan mengenalkan bahasa Indonesia melalui pembelajaran literasi.
4. Literasi merupakan kemampuan individu mengolah dan memahami informasi saat membaca atau menulis sehingga sangat tepat menjadi sarana memperkaya pembendaharaan kata, menambah wawasan terkait bahasa, dan mengembangkan kreativitas kemampuan bahasa produktif sebagai upaya membina dan melestarikan bahasa Indonesia.
5. Bahan bacaan tidak hanya teks sastra, tetapi juga teks ilmiah, dan semi ilmiah.
6. Menurut UNESCO (dalam Kemendikbud 2017, hlm. 8), konsep literasi digital menaungi dan menjadi landasan penting kemampuan memahami perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi.
7. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka berupa hasil penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.
8. Adapun materi yang dapat dimasukkan dalam literasi berbasis aplikasi digital tersebut terbagi menjadi dua materi, yakni materi umum dan materi khusus.
9. Akhir dari kegiatan literasi yang dilakukan adalah siswa dibekali kecakapan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, dan juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital.
10. LBAD merupakan upaya dalam hal pembinaan dan pemeliharaan bahasa. Pembinaan dan pemeliharaan bahasa merupakan upaya politik bahasa. Politik bahasa dalam pendidikan dapat dilakukan dengan menciptakan bahan ajar



nonformal yang telah distandardisasi sehingga siswa tidak hanya memperoleh kecakapan yang melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sesuai dengan konsep TPACK.

11. Dampak yang dipaparkan merupakan upaya memodernkan bahasa, meningkatkan mutu penggunaan bahasa, dan menjaga kelestarian bahasa melalui bidang pengajaran melalui literasi digital yang secara tidak langsung telah mewujudkan upaya pembinaan dan pemeliharaan bahasa Indonesia.

### **Tanya Jawab**

#### **Penanya 1**

Nama : Muhamad Nurcahyo  
Instansi : Universitas NU Kalbar

#### **Pertanyaan:**

1. Kajian yang dibuat peneliti masih berupa pustaka, dan tidak ada produk yang disampaikan, Aspek yang akan diukur LABD-nya apa dan apakah akan ada evaluasi produknya?

#### **Jawaban:**

1. Dibuat kurasi digital, agar bahan bacaan terstandarisasi sesuai dengan kemampuan siswa.
2. Dalam LABD terdapat banyak konsep diantara *Technological Knowledge*, *content knowledge*, *pedagogical knowledge*, *pedagogical content knowledge*, *technological content knowledge*, dan *Teknologi pedagogical knowledge*.
3. Produk yang dihasilkan bisa berupa tulisan.

#### **Penanya 2**

Nama : Cindy  
Instansi : Sekolah Pelangi

#### **Pertanyaan:**

Kaitan dimensi politik dengan dimensi digital, apakah benar ada kaitannya? Mohon dijelaskan?

#### **Jawaban:**

Ada kaitan, dengan seringnya berliterasi, meningkatkan kosakata secara tidak langsung sudah melakukan upaya pembinaan bahasa.

#### **Penanya 3**

Nama : Muhamad Rinjad  
Instansi : Unindra

#### **Pertanyaan:**

Masyarakat selalu mengesampingkan penggunaan bahasa Indonesia, bagaimana solusinya menanggapi rendahnya literasi kita?

**Jawaban:**

Meningkatkan literasi melalui pendidikan, baik melalui membaca atau menulis, termasuk literasi digital yang disesuaikan dengan konten yang sesuai dengan usia anak. Meningkatkan literasi melalui menulis atau membuat resensi. Namun, untuk masyarakat umum sulit dilakukan berbeda dengan peningkatan literasi di sekolah.

**Isu-Isu Penting:**

1. Politik bahasa dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan memperkuat peran bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Penguatan peran dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan mengenalkan bahasa Indonesia melalui pembelajaran literasi.
  2. Kebijakan bahasa harus tetap disesuaikan dengan kondisi guna menjadikan bahasa Indonesia tetap layak sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sehingga fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek tetap optimal.
  3. Literasi sebagai upaya pembinaan bahasa Indonesia.
-



# PROSIDING

KONGRES  
BAHASA  
INDONESIA XI



ISBN 978-602-437-223-6



9 786024 377236

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Daksinapati Barat IV,  
Rawamangun, Jakarta Timur